SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

b. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah tersebut perlu dijabarkan lebih operasional oleh perangkat daerah ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peratutan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun tentang Cipta Kerja menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas rencana strategis setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Inspektorat;
    d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    e. Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
    f. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
    g. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
    h. Badan Kepegawaian Daerah;
    i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
    j. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
    k. Badan Penghubung;
    l. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    m. Dinas Pendidikan;
    n. Dinas Kesehatan;

o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

p. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

q. Satuan Polisi Pamong Praja;

r. Dinas Sosial;

s. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

t. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;

u. Dinas Ketahanan Pangan;

v. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

w. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;

x. Dinas Perhubungan;

y. Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;

z. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

aa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bb. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

cc. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

dd. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

ee. Dinas Kelautan dan Perikanan;

ff. Dinas Pertanian dan Peternakan;

gg. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

hh. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Rencana Perangkat Daerah dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupaka bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 25 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang pada
tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
197007291996031001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025. Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJMD, maka harus ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perancanaan perangkat daerah untuk periode jangka menengah atau lima tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu tahun 2025-2029, dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Gubernur ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

II. Rincian Dokumen Renstra Perangkat Daerah

Seluruh dokumen Renstra masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dirinci sebagai berikut.

1. Renstra Sekretariat Daerah;
2. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Renstra Inspektorat;
4. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Renstra Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
6. Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
7. Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
8. Renstra Badan Kepegawaian Daerah;
9. Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
10. Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;

11. Renstra Badan Penghubung;
12. Renstra Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Renstra Dinas Pendidikan;
14. Renstra Dinas Kesehatan;
15. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
17. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Renstra Dinas Sosial;
19. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
21. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
22. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipili;
24. Renstra Dinas Perhubungan;
25. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
26. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
27. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
29. Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
30. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
31. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
32. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan;
33. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
34. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan telah dilantiknya Gubernur terpilih Jawa Tengah Periode masa Jabatan 2025-2030, maka disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029. Renstra tersebut sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan sekaligus penjabaran atas pembangunan jangka menengah daerah di lingkup Seketariat Daerah. Renstra Seketariat Daerah menyajikan tiga aspek utama, yaitu sasaran yang hendak dicapai; strategi dan arah kebijakan pencapaiannya; serta perumusan program dan kegiatan. Dokumen Renstra Sekretariat Daerah kemudian akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 dilakukan melalui proses identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah; penerjemahan kewenangan melalui tugas dan fungsi Setda sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016, Permendagri Nomor 56 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah maka dirumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan; serta penetapan target kinerja dan proyeksi kebutuhan pendanaanya.

Renstra Sekretariat Daerah memandang kualitas kebijakan daerah sebagai fokus dan target transformasi yang strategis pada tahun 2025-2029. Peningkatan kualitas kebijakan pada seluruh urusan pembangunan daerah akan meningkatkan kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil pembangunan daerah. Hal tersebut, diharapkan mampu meningkatkan peran Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan pedoman bagi seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk:

1). Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2). Mendorong tercapainya sasaran pembangunan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3). Mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Tujuan dan Sasaran.
4). Sebagai acuan penerapan strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
5). Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1). Sebagai alat sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan antara RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.
2). Sebagai dasar menyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3). Sebagai dasar pengukuran kinerja sampai dengan akhir pelaksanaan Renstra 2025-2029 bagi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4). Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk melakukan pengawasan atas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

5). Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Sekretariat Daerah berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Sekretariat Daerah termasuk amanat regulasinya, dan dilengkapi dengan uraian secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, serta nilai strategis Renstra terutama keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dan Renja Sekretariat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hokum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat Daerah, serta susunan garis besar isi masing-masing bab dalam Renstra Sekretariat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretaris Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah, struktur organisasi Sekretariat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Sekretaris Daerah. Uraian

tentang struktur organisasi Sekretariat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah, bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, dan indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.

2.4. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah, permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Sekretariat Daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing Sekretariat Daerah. Permasalahan yang teridentifikasi harus dapat dijawab melalui strategi, arah kebijakan, dan kinerja yang akan diwujudkan pada bab berikutnya.

2.5. Isu Strategis Sekretariat Daerah, merupakan potensi atau tantangan yang akan dihadapi oleh Sekretariat Daerah ke depan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran didapatkan dari kertas kerja cascading perangkat daerah yang telah disusun sebelumnya.

a. Tujuan Sekretariat Daerah

Tujuan Sekretariat Daerah merupakan penyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu dan dirumuskan secara spesifik dan realistis serta dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis Sekretariat Daerah. Tujuan Sekretariat Daerah menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi Sekretariat Daerah. Tujuan merupakan *ultimate outcome* dari Sekretariat Daerah yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Perumusan tujuan dilakukan dengan mengambil intisari dari penyataan isu, permasalahan, dan peluang.

b. Sasaran Sekretariat Daerah

Sasaran Sekretariat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran mendasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada biro-biro lingkup Sekretariat daerah. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *intermediate outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Sekretariat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Sedangkan arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan memperhatikan pohon kinerja dan cascading yang sudah disusun.

3.3 Manajemen Risiko Strategis Sekretariat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya. Proses manajemen risiko seluruhnya dituangkan dalam lampiran Renstra Sekretariat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah

Subbab ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selain penjabaran dan penjelasan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, dalam subbab ini juga dijelaskan sub kegiatan yang mendukung program-program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat Daerah

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU Sekretariat Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidahkaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

Lampiran berisi pohon kinerja, Cascading dan Manajemen Risiko Sekretariat Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah (Sekda) yang bertugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta pelayanan administratif. Guna melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
5) pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Instansi Daerah; dan
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga Asisten Sekda, yaitu: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Asisten Ekonomi dan Pembangunan; dan Asisten Administrasi. Masing-masing Asisten membawahi 3 (tiga) Biro.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu SEKDA dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Biro Hukum, dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan serta Perangkat Daerah lingkup pemerintahan dan kesejateraan rakyat. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum, dan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan serta perangkat daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum, dan

kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

3) pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum, dan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang pemerintahan, hukum dan dan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan;
5) pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum, dan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
6) pelaksanaan fungsi lain yang cliberikan oleh SEKDA.

Asisten Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas, membantu SEKDA dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di bidang Ekonomi dan Pembangunan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN pada Biro Perekonomian, Biro Badan Usaha Milik Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah serta Perangkat Daerah lingkup ekonomi dan pembangunan. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, badan usaha milik daerah, dan administrasi pembangunan daerah serta perangkat daerah Iingkup ekonomi dan pembangunan;
2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian, badan usaha milik daerah, dan administrasi pembangunan daerah serta perangkat daerah lingkup ekonomi dan pembangunan;
3) pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, badan usaha milik daerah, dan administrasi pembangunan daerah serta perangkat daerah Iingkup ekonomi dan pembangunan;
4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang ekonomi dan pembangunan;
5) Pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perekonomian, badan usaha milik daerah, dan administrasi pembangunan daerah serta perangkat daerah Iingkup ekonomi dan pembangunan; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh SEKDA

Asisten Administrasi mempunyai tugas, membantu SEKDA dalam pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur di bidang

organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Biro Organisasi, Biro umum dan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Perangkat Daerah lingkup administrasi. Asisten Adminitrasi mempunyai fungsi:

1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang organisasi.umum dan administrasi pengadaan barang dan jasa serta perangkat daerah lingkup administrasi;
2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pengadaan barang dan jasa serta perangkat daerah lingkup adrninistrasi;
3) Pengoordinasian pemantauan dan evaJuasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pengadaan barang dan jasa serta perangkat daerah lingkup administrasi;
4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur lingkup administrasi;
5) Pengoordinasian pelayanan administrasi dan pembinaan ASN di bidang organisasi, umum dan administrasi pengadaan barang dan jasa serta perangkat daerah lingkup administrasi; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh SEKDA.

Guna pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dibentuk sembilan Biro yang dikepalai oleh Kepala Biro. Tugas dan Fungsi Biro-biro lingkup Sekretariat Daerah.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama mempunyai tugas, melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama mempunyai Fungsi:

1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Pemerintahan;
5) Pelaksanaan fasilitasi sekretariat perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
6) Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama; dan
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

Tugas Biro Hukum yaitu melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum. Biro Hukum mempunyai Fungsi:

1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;
5) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi:

1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah raga;
2) Penggoordinasian pelaksanaan tugas PerangkatDaerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga;

3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga;
4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat;
5) Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah raga; dan
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Perekonomian melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Perekonomian, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta perhubungan, penanaman modal dan pariwisata. Biro Perekonomian mempunyai Fungsi:

1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah Badan Usaha Milik Daerah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
3) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerahdan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman 0modal dan pariwisata;
4) Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian;
5) Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
6) Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya manusia badan usaha milik daerah; dan
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.

Biro Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian. Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam mempunyai Fungsi:

1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
3) Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam;
4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
5) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.

Biro Administrasi Pembangunan Daerah melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi:

1) Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah;
5) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

Biro Organisasi melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Biro Organisasi mempunyai Fungsi:

1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
2) Pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi;
5) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN dibidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

Biro Umum melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan. Biro Umum mempunyai Fungsi:

1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;
2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;

3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;
4) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan; dan
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Biro Pengadaan Barang/Jasa menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi Pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi Pengadaan barang/jasa. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai Fungsi:

1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
2) Penggoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
3) Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa;
4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/Jasa, dan pembinaan dan advokasi Pengadaan barang/jasa;
5) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 40 Tahun 2021 tentang Oragnisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Sekretaris Daerah membawahkan:

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama; Biro Hukum; serta Biro Kesejahteraan Rakyatdan Pengentasan Kemiskinan;

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi Biro Perekonomian; Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); serta Biro Administrasi Pembangunan Daerah;
3) Asisten Administrasi, yang membawahi Biro Organisasi; Biro Umum; serta Biro Pengadaan Barang/Jasa.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariah Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan didukung sumberdaya antara lain:

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) berjumlah sekitar 513 orang. Komposisi pegawai Sekretariat Daerah cukup beragam dari segi jenjang kepangkatan dan kualifikasi. Data profil pegawai menunjukkan bahwa PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebar pada berbagai golongan, dengan proporsi terbesar pada golongan III dan IV yang mempunyai pengetahuan di bidang Pemerintahan, hukum, informatika, dan manajemen. Hal ini menggambarkan banyaknya pegawai pada level pelaksana dan administrator, sehingga peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM menjadi perhatian penting. Pola pembinaan pegawai di Sekretariat Daerah selama ini belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kinerja. sehingga program pengembangan SDM terus diupayakan agar pegawai memiliki kompetensi yang sesuai tuntutan tugas.

Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel Komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kondisi per 1 JAnuari 2025.

Tabel 2.1

Komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kondisi Bulan per 1 Januari 2025

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	SD +SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I/P3 K	II	III	IV	I	II	STRUKTURA L+III	JFT	JFU
1	Sekretaris Daerah	1						1	0				1	1				
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1						1					1		1			
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	1							1				1		1			
4	Asisten Administrasi	1							1				1		1			
5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama	22	25	0	3	0	28	16	0	9	0	25	13	0	1	2	13	31
6	Biro Hukum	30	17	0	2	3	31	11	0	7	1	32	7	0	1	1	36	9
7	Biro Kesra	18	22	0	0	5	25	10	0	6	1	26	7	0	0	0	9	31
8	Biro Perekonomian	21	14	0	2	7	15	11	0	2	6	22	5	0	1	1	3	30
9	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	19	16	0	2	1	23	9	0	6	1	19	9	0	1	1	15	18

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	SD +SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I/P3 K	II	III	IV	I	II	STRUKTURA L+III	JFT	JFU
10	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa *)	61	22	0	3	5	55	17	3	14	4	56	9	0	0	5	56	22
11	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	21	13	0	2	1	19	12	0	7	1	18	8	0	0	1	16	17
12	Biro Organisasi	25	23	0	2	5	25	16	0	3	3	34	8	0	1		21	26
13	Biro Umum	102	38	7	42	12	64	15	0	15	26	92	7	0	0	11	12	117
JUMLAH		323	190	7	58	39	285	119	5	69	43	324	77	1	8	22	181	301

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Jateng, 1 Januari 2025

b. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan Prasarana: Kantor Sekretariat Daerah menempati kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jl. Pahlawan No. 9, Semarang.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, sebagaimana tercantum pada tabel Rekapitulasi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel Rekapitulasi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Penunjang

NO.	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
1	1.3.1.01	TANAH	15
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	40
4	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	315
5	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	19
6	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-
7	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	8.815
8	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.787
9	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	13
10	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-
	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	8
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	1.936
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-

NO.	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	25
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	45
22	1.3.3.02	MONUMEN	-
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	-
27	1.3.4.03	INSTALASI	-
28	1.3.4.04	JARINGAN	-
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	10.747
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/ KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	52
31	1.3.5.03	HEWAN	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	-
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-
		JUMLAH	23.817

Sumber : Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Jateng, 31 Desember 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kinerja pelayanan OPD merupakan capaian kinerja OPD yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Dalam kurun waktu RPJMD sebelumnya, kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan beberapa capaian positif di bidang tata kelola pemerintahan. Salah satu indikator kinerja utama adalah peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Provinsi Jawa Tengah berhasil mempertahankan predikat “BB” (Sangat Baik) atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

selama empat tahun berturut-turut sejak 2020, dan meningkat menjadi predikat “A” (Memuaskan) atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024. Capaian ini menandakan bahwa perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah berlangsung dengan baik dan sesuai prinsip akuntabilitas.

Upaya digitalisasi dan integrasi sistem informasi juga telah membuahkan hasil. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Jawa Tengah meningkat signifikan dari skor 2,74 pada tahun 2021 menjadi 4,26 pada tahun 2023 (skala 5), meraih predikat “memuaskan” sebagai salah satu yang tertinggi secara nasional. Penghargaan *Digital Government Award* yang diterima Jawa Tengah tahun 2024 dari Presiden RI merupakan pengakuan atas kemajuan tersebut. Peningkatan indeks SPBE ini menunjukkan bahwa berbagai inovasi e-government (misalnya aplikasi LaporGub, Open Data Jateng, e-Planning, e-Budgeting) yang dikoordinasikan Sekretariat Daerah telah diimplementasikan efektif, sehingga mendorong transparansi dan kecepatan layanan administrasi publik.

Di samping itu, Sekretariat Daerah juga berperan dalam memfasilitasi perumusan produk hukum dan kebijakan daerah. Dalam periode lalu, Sekretariat Daerah melalui Biro Hukum telah mengoordinasikan penyusunan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur strategis, serta menjalin kerja sama antar daerah. Namun, kinerja fungsi koordinatif ini masih akan ditingkatkan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program terus dievaluasi; sebelumnya masih dijumpai ketidaksesuaian rencana kerja dengan realisasi kegiatan di beberapa perangkat daerah. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan daerah agar pelaksanaan program sesuai rencana dan target kinerja tercapai.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Strategis Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, capaian sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(5)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
A. Renstra Tahun 2018-2023																			
Persentase Kebijakan yang Efektif	%				80	81	83	84		86,08	81	80,4	80		108%	100%	97%	95%	
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%				75	81	83	84		83,13	81	86,5	85		111%	100%	104%	101%	
Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%				76	76	78	79		77,50	76	Na	Na		102%	100%	Na	Na	
Nilai IKM Setda	%				Na	Na	78	78,5		Na	Na	85,8	78,5		Na	Na	110%	100%	
Nilai Sakip Setda	%				Na	Na	73,77	73,97		Na	Na	77,2	73,97		Na	Na	105%	100%	
Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%				85	85	85	85		100	85	Na	Na		118%	100%	Na	Na	
Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%				85	85	85	85		100	85	Na	Na		118%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%				70	75	85	90		70	75	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	%				Na	Na	90	90		Na	Na	100	100		Na	Na	111%	111%	
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%				80	85	85	85		80,65	85	Na	Na		101%	100%	Na	Na	
Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%				Na	Na	40	45		Na	Na	42,9	45		Na	Na	107%	100%	
Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%				93	91	93	94		100	91	Na	Na		108%	100%	Na	Na	
Persentase efektifitas produk hukum daerah	%				Na	Na	95	95		Na	Na	100	100		Na	Na	105%	105%	
Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	%				Na	Na	95	95		Na	Na	100	100		Na	Na	105%	105%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%				87	87	93	94		100	87	Na	Na		115%	100%	Na	Na	
Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%				75	83	84	85		99	83	Na	Na		133%	100%	Na	Na	
Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%				Na	Na	88	89		Na	Na	91,97	92		Na	Na	105%	103%	
Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%				82	82	84	85		99	82	Na	Na		121%	100%	Na	Na	
Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD	%				81	82	83	84		85	82	Na	Na		105%	100%	Na	Na	
Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	%				90	91	93	94		100	91	Na	Na		111%	100%	Na	Na	
peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%				90	91	93	94		100	91	Na	Na		111%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%				90	91	93	94		100	91	Na	Na		111%	100%	Na	Na	
Nilai Kematangan Organisasi Daerah	skor				29	22	28	31		31,84	22	Na	Na		110%	100%	Na	Na	
Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	%				Na	Na	75,61	85,37		Na	Na	100	100		Na	Na	132%	117%	
presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%				70,00	64.32	89	100		93,22	64,32	Na	Na		133%	####	Na	Na	
Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A	%				Na	Na	60,98	85,37		Na	Na	65,85	86,00		Na	Na	108%	101%	
Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%				78	78	87	92		83,67	78	Na	Na		107%	100%	Na	Na	
Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%				50	40	70	85		68,57	40	Na	Na		137%	100%	Na	Na	
Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke	%				Na	Na	83,67	87,76		Na	Na	91,8	93		Na	Na	110%	106%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%				70	84	92	96		70	84	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang bidang SDA	%				Na	Na	80	82		Na	Na	82,6	82		Na	Na	103%	100%	
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang	%				85	85	85	85		70	85	Na	Na		82%	100%	Na	Na	
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%				70	89	93	95		70	89	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Efektivitas Pelayanan	%				30	65	67	70		32	65	92,2	93		107%	100%	138%	133%	
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%				71	85	85	85		85,71	85	Na	Na		121%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%				70	84	92	96		80	84	Na	Na		114%	100%	Na	Na	
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				80	100	100	100		100	100	Na	Na		125%	100%	Na	Na	
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%				80	85	85	85		83,33	85	Na	Na		104%	100%	Na	Na	
Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%				Na	Na	85	90		Na	Na	86,7	90		Na	Na	102%	100%	
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%				80	100	100	100		40	100	Na	Na		50%	100%	Na	Na	
Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%				Na	Na	76	78		Na	Na	76,9	78		Na	Na	101%	100%	
Ketercapaian Laba BUMD	%				Na	Na	70	75		Na	Na	98,2	99		Na	Na	140%	132%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
BIRO PEMOTDAKER																			
Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang	%				Na	Na	90	90		Na	Na	100	100		Na	Na	111%	111%	
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	%				100	100	100	100		100,00	100,00	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%				100	100	100	100		100,00	100,00	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Efektivitas kerjasama daerah	%				Na	Na	90	95		Na	Na	100	100		Na	Na	111%	105%	
Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase tertib administrasi pemerintahan	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%				Na	Na	90	95		Na	Na	100	100		Na	Na	111%	105%	
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
BIRO ORGANISASI																			
Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian (Biro	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan (Biro Organisasi)	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	%				85	87	92	97		85	82,50	Na	Na		100%	95%	Na	Na	
Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	%				Na	Na	85,71	91		Na	Na	85,71	91		Na	Na	100%	100%	
Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	%				45	57	71	85		45	88,57	Na	Na		100%	155%	Na	Na	
Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	%				Na	Na	91,84	95,92		Na	Na	91,84	95,92		Na	Na	100%	100%	
Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%				51	31	40	48		51	52,78	Na	Na		100%	170%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%				Na	Na	77,14	80		Na	Na	77,1	80		Na	Na	100%	100%	
Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%				Na	Na	29,27	34,15		Na	Na	29,3	34,15		Na	Na	100%	100%	
Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	%				84	85	85	86		84	89,5	Na	Na		100%	105%	Na	Na	
Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan	%				Na	Na	85,36	87,8		Na	Na	85,4	87,8		Na	Na	100%	100%	
Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%				67,99	79	89,19	100		67,99	79,44	85,9	89,47		100%	101%	96%	89%	
Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	%				100	83	92	100		100	100	Na	Na		100%	120%	Na	Na	
Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	%				Na	Na	73,17	85,37		Na	Na	87,8	85,37		Na	Na	120%	100%	
Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	%				30,36	35	47,06	60		34,25	42,66	73,7	85,63		113%	122%	157%	144%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%				100	51	57	63		100	100	Na	Na		100%	196%	Na	Na	
BIRO KESRA																			
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat,	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial,	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang	%				85	85	95	100		85	85	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%				Na	Na	90	95		Na	Na	91,64	95		Na	Na	102%	100%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%				Na	Na	90	95		Na	Na	100	100		Na	Na	111%	105%	
Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%				Na	Na	40	42		Na	Na	40	42		Na	Na	100%	100%	
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
BIRO HUKUM																			
Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	%				91	92	93	94		100	92	Na	Na		110%	100%	Na	Na	
Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%				Na	Na	95	96		Na	Na	100	100		Na	Na	105%	104%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase efektifitas produk hukum daerah	%				93	93	93	93		100	100	Na	Na		108%	108%	Na	Na	
Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%				91	92	93	94		100	92	Na	Na		110%	100%	Na	Na	
Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	%				91	92	93	94		100	92	Na	Na		110%	100%	Na	Na	
Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	%				91	92	93	94		100	92	Na	Na		110%	100%	Na	Na	
Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%				Na	Na	95	96		Na	Na	100	100		Na	Na	105%	104%	
Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	%				Na	Na	95	95		Na	Na	100	100		Na	Na	105%	105%	
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
BIRO ISDA																			
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				100	90	95	100		100	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				100	90	95	100		100	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				100	90	95	100		100	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%				Na	Na	90	95		Na	Na	97,1	95		Na	Na	108%	100%	
Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%				Na	Na	95	96		Na	Na	99	96		Na	Na	104%	100%	
Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%				Na	Na	87	90		Na	Na	93,4	90		Na	Na	107%	100%	
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
BIRO PEREKONOMIAN																			
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal	%				80	80	80	80		80	80	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian,	%				85	90	93	96		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	%				85	88	90	93		85	88	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal	%				90	93	95	97		90	93	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	%				89	90	93	95		89	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	%				90	75	96	98		90	75	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				85	87	90	92		85	87	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				83	85	89	90		83	85	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase tingkat kesehatan BUMD	%				82	70	88	90		82	70	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%				Na	Na	80	82		Na	Na	87,5	82		Na	Na	109%	100%	
Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%				Na	Na	75	77		Na	Na	75	77		Na	Na	100%	100%	
Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%				Na	Na	75	80		Na	Na	85,7	80		Na	Na	114%	100%	
Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%				Na	Na	80	85		Na	Na	94,6	85		Na	Na	118%	100%	
Nilai kemandirian BLUD	%				Na	Na	50	55		Na	Na	69,3	55		Na	Na	139%	100%	
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
BIRO APBJ																			
Persentase Aduan dan Sengketa yang	%				73	76	79	80		73	76	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	%				73	76	79	80		73	76	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Keberhasilan Pengadaan	%				91	92	93	95		91	92	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Permasalahan Kelembagaan	%				Na	Na	90	92		Na	Na	90	92		Na	Na	100%	100%	
Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%				Na	Na	85	90		Na	Na	95,27	90		Na	Na	112%	100%	
Persentase Fasilitasi Pengadaan	%				Na	Na	93	95		Na	Na	94,80	95		Na	Na	102%	100%	
Presentase Capaian Administrasi	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
BIRO ADM. BANGDA																			
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan	%				85	85	85	85		100	85	Na	Na		118%	100%	Na	Na	
Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai	%				80	81	84	85		80,68	81	Na	Na		101%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	%				87	88	88	88		95,24	88	Na	Na		109%	100%	Na	Na	
Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai	%				84	84	89	90		84,35	84	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
Persentase realisasi bantuan keuangan	%				Na	Na	83	85		Na	Na	99,6	85		Na	Na	120%	100%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%				Na	Na	80	85		Na	Na	92	85		Na	Na	115%	100%	
Capaian Pelaksanaan APBD	%				Na	Na	98	98,5		Na	Na	99,09	98,5		Na	Na	101%	100%	
Capaian Pelaksanaan APBN	%				Na	Na	95	95,50		Na	Na	98,99	95,50		Na	Na	104%	100%	
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
B. Renstra 2024-2026																			
Indeks Kematangan Kebijakan	Angka				Na	Na	Na	Na	36,1	Na	Na	Na	Na	39,93					110,6
Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	%				Na	Na	Na	Na	76	Na	Na	Na	Na	74,33					97,8

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup	%				Na	Na	Na	Na	90	Na	Na	Na	Na	93,72					104,1
Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan	%				Na	Na	Na	Na	90	Na	Na	Na	Na	96,83					107,6
Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%				Na	Na	Na	Na	80	Na	Na	Na	Na	86,3					107,9
Indeks Kepuasan Masyarakat	%				Na	Na	Na	Na	82	Na	Na	Na	Na	86,25					105,2
Indeks Manajemen Risiko	Angka				Na	Na	Na	Na	3	Na	Na	Na	Na	2,89					96,33
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA																			
Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%				Na	Na	Na	Na	95	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	105,3
Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%				Na	Na	Na	Na	95	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	105,3

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%				Na	Na	Na	Na	95	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	105,3
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO HUKUM																			
Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%				Na	Na	Na	Na	96	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	104,2
Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%				Na	Na	Na	Na	96	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	104,2

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%				Na	Na	Na	Na	96	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	104,2
Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%				Na	Na	Na	Na	96	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	104,2
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																			
Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	%				Na	Na	Na	Na	81	Na	Na	Na	Na	81	Na	Na	Na	Na	100
Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	%				Na	Na	Na	Na	82	Na	Na	Na	Na	82	Na	Na	Na	Na	100
Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%				Na	Na	Na	Na	54	Na	Na	Na	Na	54	Na	Na	Na	Na	100

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO PEREKONOMIAN																			
Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%				Na	Na	Na	Na	83	Na	Na	Na	Na	83	Na	Na	Na	Na	100
Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%				Na	Na	Na	Na	78	Na	Na	Na	Na	78	Na	Na	Na	Na	100
Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%				Na	Na	Na	Na	85	Na	Na	Na	Na	89,88	Na	Na	Na	Na	105,7
Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%				Na	Na	Na	Na	81	Na	Na	Na	Na	100,7	Na	Na	Na	Na	124,3
Persentase nilai kemandirian BLUD	%				Na	Na	Na	Na	55	Na	Na	Na	Na	71,78	Na	Na	Na	Na	130,5

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA																			
Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%				Na	Na	Na	Na	87	Na	Na	Na	Na	89,01	Na	Na	Na	Na	102,3
Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%				Na	Na	Na	Na	85	Na	Na	Na	Na	99,3	Na	Na	Na	Na	116,8
Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%				Na	Na	Na	Na	85	Na	Na	Na	Na	97,33	Na	Na	Na	Na	114,5
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA																			
Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%				Na	Na	Na	Na	90	Na	Na	Na	Na	94,78	Na	Na	Na	Na	105,3

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%				Na	Na	Na	Na	80	Na	Na	Na	Na	88,67	Na	Na	Na	Na	110,8
Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%				Na	Na	Na	Na	81	Na	Na	Na	Na	81,25	Na	Na	Na	Na	100,3
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH																			
Capaian Pelaksanaan APBD	%				Na	Na	Na	Na	98,7	Na	Na	Na	Na	99,76	Na	Na	Na	Na	101,1
Capaian Pelaksanaan APBN	%				Na	Na	Na	Na	95,5	Na	Na	Na	Na	96,72	Na	Na	Na	Na	101,3

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi bantuan keuangan	%				Na	Na	Na	Na	85	Na	Na	Na	Na	99,21	Na	Na	Na	Na	116,7
Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%				Na	Na	Na	Na	85	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	117,6
Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%				Na	Na	Na	Na	90	Na	Na	Na	Na	90	Na	Na	Na	Na	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO ORGANISASI																			

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%				Na	Na	Na	Na	14,29	Na	Na	Na	Na	54,29	Na	Na	Na	Na	379,9
Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%				Na	Na	Na	Na	85,71	Na	Na	Na	Na	85,71	Na	Na	Na	Na	100
Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%				Na	Na	Na	Na	50	Na	Na	Na	Na	57,7	Na	Na	Na	Na	115,4
Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%				Na	Na	Na	Na	66	Na	Na	Na	Na	66	Na	Na	Na	Na	100
Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%				Na	Na	Na	Na	88,73	Na	Na	Na	Na	88,73	Na	Na	Na	Na	100
Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%				Na	Na	Na	Na	64,28	Na	Na	Na	Na	64,28	Na	Na	Na	Na	100

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%				Na	Na	Na	Na	88,1	Na	Na	Na	Na	92	Na	Na	Na	Na	104,4
Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%				Na	Na	Na	Na	60	Na	Na	Na	Na	61,22	Na	Na	Na	Na	102
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO UMUM																			
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Peayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Provnsi Jawa Tengah Tahub 2018-2023

No	Uraian	ndikatif Renstra PD pada Tahun (					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai dengan Tahun (Rp.000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp.000)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I	**PENDAPATAN DAERA**	-	-	-	-	-	**326.000.000**	**812.600.000**	**832.000.000**	**800.000.000**	**1.010.040.000**	**440.106.000**	**485.600.000**	**616.000.000**	**826.840.000**	**896.140.000**	135%	60%	74%	103%	Na	20,73	(13,18)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	**326.000.000**	**812.600.000**	**832.000.000**	**800.000.000**	**1.010.040.000**	**440.106.000**	**485.600.000**	**616.000.000**	**826.840.000**	**896.140.000**	135%	60%	74%	103%	Na	20,73	(13,18)
	Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	326.000.000	812.600.000	832.000.000	800.000.000	1.010.040.000	440.106.000	485.600.000	616.000.000	826.840.000	896.140.000	135%	60%	74%	103%	Na	20,73	(13,18)
II	**BELANJA DAERAH**	-	-	-	-	-	**164.828.221.000**	**644.715.876.000**	**628.782.550.000**	**675.016.997.000**	**640.487.566.000**	**159.553.415.257**	**588.580.305.652**	**614.386.948.554**	**656.153.301.617**	**615.983.500.637**	97%	91%	98%	97%	Na	53,37	66,34
	BELANJA OPERASI	-	-	-	-	-	**159.544.548.000**	**640.691.373.000**	**624.032.738.000**	**656.033.805.000**	**628.542.066.000**	**154.279.892.637**	**584.603.803.452**	**609.709.620.380**	**637.319.365.175**	**604.331.779.535**	97%	91%	98%	97%	Na	55,67	69,46
	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	93.102.759.000	103.630.731.000	107.526.291.000	114.268.943.000	123.537.963.000	89.710.867.139	102.464.923.893	104.585.679.751	109.202.844.869	110.022.961.259	96%	99%	97%	96%	Na	(0,05)	(4,60)
	Belanja Barang dan Ja	-	-	-	-	-	66.441.789.000	152.406.532.000	89.888.837.000	108.543.747.000	99.258.603.000	64.569.025.498	108.946.745.559	87.164.830.629	105.889.105.306	95.755.318.276	97%	71%	97%	98%	Na	12,16	0,18
	Belanja Hibah	-	-	-	-	-		384.654.110.000	426.617.610.000	433.221.115.000	405.745.500.000		373.192.134.000	417.959.110.000	422.227.415.000	398.553.500.000	Na	Na	98%	97%	Na	3,16	12,00
	BELANJA MODAL	-	-	-	-	-	**5.283.673.000**	**4.024.503.000**	**4.749.812.000**	**18.983.192.000**	**11.945.500.000**	**5.273.522.620**	**3.976.502.200**	**4.677.328.174**	**18.833.936.442**	**11.651.721.102**	100%	99%	98%	99%	Na	(11,63)	(23,53)
	Belanja Modal Pealatan dan Mesin	-	-	-	-	-	5.273.770.000	3.377.167.000	4.749.812.000	18.983.192.000	11.945.500.000	5.263.619.620	3.340.114.200	4.677.328.174	18.833.936.442	11.651.721.102	100%	99%	98%	99%	Na	(8,99)	(20,03)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-		193.350.000					191.053.000				Na	Na	#DIV/0!	Na	Na	Na	Na
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	9.903.000	453.986.000				9.903.000	445.335.000				100%	98%	#DIV/0!	Na	Na	Na	Na
III	**PEMBIAYAAN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Belum Optimal	1. Fungsi koordinasi antar-OPD belum efektif. 2. Monitoring dan evaluasi belum maksimal.	1. Forum koordinasi belum optimal. 2. Validasi data indikator kinerja belum berjalan optimal, menyebabkan laporan Monev tidak mencerminkan kondisi faktual.
2.	Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Lemah	1. Penyusunan Kebijakan masih kurang optimal. 2. Penyusunan Perda dan Pergub sering terlambat. 3. Penyesuaian kebijakan daerah lambat.	1. Kekurangan analis kebijakan dan Perancang Perundang-undangan. 2. Koordinasi Biro Hukum dan biro teknis kurang. 3. Perubahan regulasi pusat sering terjadi tanpa sinkronisasi.
3.	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kurang Terintegrasi	1. Kurangnya Analisis Dampak Program. 2. Keterlambatan penyerapan anggaran. 3. Indikator kinerja belum terukur dengan baik	1. Analisis *cost-benefit* dan efektivitas program belum digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana kerja. 2. Kekurangan SDM analis perencanaan. 3. Minim pelatihan teknis perencanaan.
4.	Kualitas dan Kapasitas SDM Belum Merata	1. Kompetensi teknis ASN belum memadai. 2. Penguasaan teknologi informasi masih rendah. 3. Distribusi pegawai antar-biro belum seimbang	1. Minim pelatihan berbasis kinerja 2. Resistensi ASN senior terhadap transformasi digital. 3. Rekrutmen dan rotasi pegawai belum berbasis kompetensi.
5.	Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Belum Maksimal	1. Aplikasi pelayanan publik belum terintegrasi. 2. Infrastruktur TI belum memadai.	1. Setiap OPD historisnya mengembangkan aplikasi sendiri dengan database dan platform terpisah, tanpa *interoperabilitas* satu sama lain. 2. Kurangnya investasi pengembangan TI.

Bertolak dari permasalahan dan tantangan di atas, terdapat beberapa isu strategis yang harus menjadi fokus perhatian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ke depan. Isu strategis ini merupakan kondisi-kondisi krusial yang akan memengaruhi keberhasilan pencapaian visi-misi pembangunan daerah, dan karenanya perlu diutamakan dalam perumusan kebijakan dan program Sekretariat Daerah:

1. Sinergi Kebijakan dan Koordinasi Lintas Sektor. Menguatkan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator adalah isu strategis berikutnya. Diperlukan peningkatan sinergitas kebijakan daerah antar perangkat daerah maupun antara provinsi dengan kabupaten/kota. Isu ini mencakup penguatan mekanisme perencanaan terpadu (melalui forum-forum koordinasi, executive briefing, dll.), integrasi sistem informasi perencanaan dan keuangan, serta penajaman tugas Asisten Sekda dalam mengawal program prioritas lintas sektor. Keberhasilan menangani isu ini akan diukur dari semakin selarasnya dokumen perencanaan (RKPD, Renstra OPD) dengan pelaksanaan di lapangan, minimnya tumpang tindih program antar OPD, serta efektifnya pelaksanaan kebijakan strategis yang melibatkan banyak sektor (misalnya penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan lain-lain).
2. Peningkatan *Good Governance* melalui Reformasi Birokrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik (akuntabel, transparan, efektif) tetap menjadi isu strategis utama. Hal ini mencakup percepatan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan seluruh OPD, penyederhanaan proses layanan administrasi, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Tujuan strategisnya adalah meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator keberhasilan untuk isu ini antara lain perbaikan skor akuntabilitas (SAKIP) dan indeks reformasi birokrasi, serta meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja pemerintah provinsi.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur. Sekretariat Daerah juga mengemban isu strategis terkait peningkatan kualitas layanan internal pemerintahan, seperti layanan administrasi umum, kesekretariatan, keprotokolan, dan kehumasan pemerintah. Pelayanan administratif yang cepat, tepat, dan berorientasi pengguna *(user-friendly)* menjadi agenda strategis, sejalan dengan semangat menghadirkan birokrasi yang melayani. Di samping itu, pembinaan terhadap ASN di lingkungan Sekretariat Daerah dan OPD lain perlu diperkuat untuk memastikan aparatur memiliki disiplin dan kompetensi sesuai kebutuhan. Fokus ini selaras dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan pembinaan ASN di Sekretariat Daerah. Indikatornya dapat berupa peningkatan skor kepuasan unit-unit OPD terhadap pelayanan Sekretariat Daerah, serta hasil evaluasi kepatuhan standar layanan public.
4. Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Mengingat tren kemajuan teknologi, isu strategis lain adalah melanjutkan dan memperluas implementasi *e-government* atau SPBE di Pemprov Jawa Tengah. Sekretariat Daerah harus mendorong integrasi berbagai aplikasi dan database lintas dinas (sejalan arahan Presiden mengenai integrasi layanan digital. serta memastikan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Transformasi digital ini

diharapkan meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempersempit peluang korupsi, sekaligus memudahkan akses informasi bagi publik. Tantangan strategisnya adalah membangun infrastruktur TI yang andal, standar keamanan siber, serta meningkatkan kapabilitas ASN dalam memanfaatkan teknologi. Keberhasilan isu ini dapat dipantau melalui peningkatan Indeks SPBE yang sudah mencapai level memuaskan (4,26) pada 2023 dengan target naik ke kategori sangat memuaskan di masa mendatang, dan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik digital di provinsi Jawa Tengah.

5. Penguatan Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemangku Kepentingan. Sekretariat Daerah juga memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara pemerintah provinsi dengan DPRD, pemerintah pusat, swasta, serta masyarakat. Isu strategis di sini adalah bagaimana memastikan sinergi dengan para pemangku kepentingan eksternal. Ini mencakup optimalisasi fungsi fasilitasi Sekretariat Daerah dalam kerjasama antardaerah, kemitraan dengan dunia usaha/BUMN, serta koordinasi dengan instansi vertikal. Rendahnya sinergitas stakeholder di masa lalu menjadi pembelajaran bahwa forum komunikasi yang rutin dan terpadu perlu ditingkatkan. Outcome strategis yang diharapkan ialah terjalinnya koordinasi yang erat dalam penanganan isu-isu lintas wilayah (misal: pengendalian inflasi regional, penanganan bencana, investasi, dll.), sehingga Pemprov Jateng dapat bertindak proaktif dan kolaboratif bersama stakeholder untuk mencapai sasaran pembangunan.

Isu-isu strategis di atas akan menjadi landasan perumusan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ke depan. Dengan fokus pada penguatan tata kelola, koordinasi, pelayanan administrasi, transformasi digital, dan kemitraan strategis, diharapkan Sekretariat Daerah dapat semakin berperan optimal sebagai lokomotif birokrasi dalam menyukseskan agenda pembangunan Jawa Tengah. Guna melengkapi identifikasi isu di atas, disusun analisis SWOT untuk menilai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kekuatan (*Strengths*) mencakup hal-hal positif internal seperti dukungan kuat dari pimpinan daerah dan struktur organisasi Sekretariat Daerah yang lengkap hingga tingkat biro. serta komitmen Pemprov terhadap transparansi dan inovasi dalam tata kelola. Kelemahan (*Weaknesses*) meliputi kelemahan internal yang masih harus diperbaiki, antara lain koordinasi lintas OPD yang belum optimal, keterbatasan SDM baik dari segi jumlah maupun kompetensi khusus, serta proses perencanaan dan evaluasi yang belum terintegrasi sepenuhnya secara digital.

Dari sisi lingkungan luar, Peluang (*Opportunities*) bagi Sekretariat Daerah antara lain dukungan kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sejalan dengan upaya Pemprov Jateng, perkembangan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk efisiensi administrasi, tingginya tuntutan publik terhadap transparansi yang mendorong inovasi pelayanan, serta potensi kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder lain dalam pembangunan daerah. Sementara itu, Ancaman (*Threats*) eksternal yang dihadapi mencakup perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang sangat cepat dan sering (menuntut penyesuaian daerah yang juga cepat). keterbatasan anggaran terutama dalam situasi ekonomi tertentu yang dapat memengaruhi dukungan pendanaan bagi penguatan kelembagaan, resistensi atau kendala budaya organisasi di internal birokrasi terhadap perubahan, serta

kompleksitas permasalahan lintas sektor dan wilayah (seperti kemiskinan, pengangguran, bencana) yang memerlukan koordinasi intensif dan solusi inovatif.

Hasil analisis SWOT tersebut tersaji dalam diagram empat kuadran di atas, yang akan menjadi referensi dalam merumuskan strategi Sekretariat Daerah. Dengan memahami kekuatan yang perlu dimaksimalkan, kelemahan yang harus diminimalisir, serta bagaimana memanfaatkan peluang dan mengantisipasi ancaman, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun langkah-langkah strategis yang lebih tepat sasaran. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan peran Sekretariat Daerah sebagai pendukung Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga berbagai isu strategis dapat diatasi dan target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2.27.
Analisa SWOT Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

SWOT	Penjabaran SWOT
Strenght (Kekuatan)	• Struktur organisasi lengkap dan jelas — terdiri dari tiga asisten dan sembilan biro dengan pembagian tugas yang spesifik sehingga koordinasi internal lebih mudah dilakukan. • Komitmen pimpinan tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan inovasi tata kelola pemerintahan. • Capaian kinerja positif — Jawa Tengah mempertahankan predikat A untuk SAKIP dan meraih Indeks SPBE 4,26 (memuaskan) pada 2023. • Integrasi sistem informasi — penerapan aplikasi e-Planning, e-Budgeting, Open Data Jateng, LaporGub mendukung pelayanan administrasi publik yang lebih transparan. • Hubungan baik dengan stakeholder — sudah terjalin komunikasi strategis dengan DPRD, pemerintah pusat, BUMN, dan pihak swasta.
Weakness (Kelemahan)	• Koordinasi lintas OPD belum optimal — masih ditemukan tumpang tindih program antar perangkat daerah. • Kualitas dan distribusi SDM belum merata — beberapa biro kekurangan tenaga fungsional ahli, sementara fungsi administratif relatif berlebih. • Budaya kerja kurang adaptif — sebagian ASN kurang responsif terhadap perubahan, khususnya transformasi digital. • Perumusan kebijakan dan harmonisasi regulasi masih lambat, sehingga kadang tertinggal dalam penyesuaian terhadap regulasi pusat. • Sistem perencanaan dan evaluasi masih belum sepenuhnya terintegrasi antar OPD dan biro.
Opportunity (Peluang)	• Dukungan kebijakan nasional — pemerintah pusat mendorong percepatan reformasi birokrasi dan integrasi SPBE yang selaras dengan visi Pemprov. • Perkembangan teknologi informasi — memberikan peluang untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik dan integrasi data lintas sektor. • Tuntutan publik terhadap transparansi — memacu Sekretariat Daerah untuk menghadirkan layanan administrasi yang cepat, terbuka, dan berbasis digital. • Kerja sama antardaerah dan lintas sektor — membuka peluang sinergi kebijakan dengan kabupaten/kota, BUMD, swasta, dan stakeholder lainnya. • Potensi dukungan dana pusat dan internasional — melalui program-progam percepatan reformasi birokrasi, transformasi digital, dan peningkatan kualitas layanan publik
Threats (Tantangan)	• Perubahan regulasi pusat yang cepat — memaksa daerah melakukan penyesuaian kebijakan dengan segera agar tidak terjadi kekosongan hukum. • Keterbatasan anggaran daerah — dapat menghambat program penguatan kelembagaan dan inovasi pelayanan publik. • Resistensi budaya organisasi — sebagian pegawai senior masih enggan beradaptasi dengan pola kerja baru berbasis teknologi. • Kompleksitas permasalahan lintas sektor — seperti pengentasan kemiskinan, inflasi, investasi, dan bencana, yang menuntut koordinasi intensif. • Ancaman keamanan siber — meningkatnya ketergantungan pada aplikasi digital menuntut proteksi data dan infrastruktur TI yang lebih kuat.

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel 2.6
Perumusan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permaslaahan Perangkat Daerah	Isu KLHS dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Jawa Tengah memiliki jumlah **penduduk besar** dan struktur sosial-budaya yang mendukung gotong royong dan kolaborasi antar sektor	Kurangnya forum koordinasi strategis yang rutin antara Setda, OPD, dan pemangku kepentingan eksternal	Pentingnya integrasi kebijakan pembangunan lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial-ekonomi	Agenda SDGs (*Sustainable Development Goals*): Perlunya sinergi lintas sektor untuk mencapai target SDG, terutama SDG 16 (*institusi pemerintah yang efektif dan inklusif*) dan SDG 17 (*kemitraan pembangunan*	Prioritas pembangunan nasional 2025–2029: Penanggulangan kemiskinan, peningkatan SDM, transformasi digital, dan pemerataan infrastruktur menuntut koordinasi lintas sektor di daerah.	Kompleksitas masalah ketahanan pangan, energi, dan bencana alam di Jawa Tengah memerlukan sinergi kebijakan antar-OPD, kabupaten/kota, dan pihak swasta	Sinergi Kebijakan dan Koordinasi Lintas Sektor
Indeks SPBE Pemprov Jateng mencapai 4,26 (*memuaskan*), salah satu tertinggi nasional, sebagai modal penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang transparan dan efisien	Implementasi reformasi birokrasi belum berdampak langsung pada outcome publik, meskipun regulasi dan program sudah banyak dijalankan	Reformasi birokrasi diarahkan agar kebijakan lintas sektor selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	SDGs 2030 menempatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan inklusif sebagai kunci pembangunan berkelanjutan (SDG 16)	RPJMN 2025–2029 menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu agenda prioritas nasional untuk mewujudkan birokrasi bersih, efektif, dan melayani	Kualitas layanan publik di kabupaten/kota Jawa Tengah masih bervariasi, memerlukan dukungan Setda untuk pembinaan dan harmonisasi pelayanan publik lintas wilayah	Peningkatan *Good Governance* melalui Reformasi Birokrasi
Tingginya komitmen pimpinan daerah terhadap kualitas	Budaya pelayanan prima belum sepenuhnya	Pembinaan aparatur diperlukan agar kebijakan pelayanan	SDGs 2030 mendorong prinsip pelayanan publik inklusif, adil,	Peningkatan kompetensi ASN nasional menjadi program prioritas untuk	Kesenjangan kualitas layanan publik antar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permaslaahan Perangkat Daerah	Isu KLHS dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
layanan publik memberi potensi besar bagi Setda untuk memimpin pembinaan aparatur dan peningkatan pelayanan	tertanam pada aparatur, terutama di level teknis	publik mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan	dan berkualitas (SDG 16 dan SDG 10)	mendukung transformasi layanan publik yang responsif dan efisien	kabupaten/kota di Jawa Tengah	
Sudah tersedia berbagai aplikasi layanan publik seperti e-Planning, e-Budgeting, e-Controlling, LaporGub, Open Data Jateng, dan Jateng Smart Province	Belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik antar-OPD, menyebabkan data masih tersebar	pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam integrasi data spasial dan non-spasial untuk perencanaan berbasis bukti	Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) mendorong penggunaan teknologi digital untuk memperluas keterbukaan data dan partisipasi publik (SDG 16 dan SDG 17)	Pemerintah pusat mendorong penerapan Satu Data Indonesia untuk mendukung kebijakan berbasis data akurat dan terintegrasi	antangan Jawa Tengah dalam mengintegrasikan aplikasi layanan publik antar-OPD agar masyarakat mendapat layanan cepat, mudah, dan transparan	Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki jejaring kelembagaan yang luas, baik dengan DPRD, instansi vertikal, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal	Belum maksimalnya pemanfaatan kemitraan swasta dan potensi CSR untuk mendukung pembangunan daerah	Pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil	Tuntutan global terhadap pemerintahan inklusif, transparan, dan kolaboratif memerlukan peran Setda sebagai fasilitator hubungan antar pihak	RPJMN 2025–2029 menekankan kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan	Potensi CSR daerah, forum investasi, dan kolaborasi lintas kabupaten/kota belum dimanfaatkan optimal untuk mendukung pembangunan regional	Penguatan Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemangku Kepentingan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Reformasi Birokrasi di Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan memperhatikan 8 (delapan) area perubahan meliputi: (1). Manajemen Perubahan; (2). Deregulasi Kebijakan; (3). Penataan dan Penguatan Organisasi; (4). Penataan Tatalaksana; (5). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (6). Penguatan Akuntabilitas; (7). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (8). Penguatan Pengawasan. Sekretariat Daerah Jawa Tengah memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah terutama dalam perumusan kebijakan daerah, selain itu sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan di Jawa Tengah. Rumusan Kebijakan kemudian dituangkan kedalam regulasi yang diharapkan menjadi sarana mencapai target-target pembangunan dan mampu menjawab kebutuhan perubahan lingkungan strategis yang cepat, dinamis, kompleks, tidak terduga, dan tidak pasti di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity,* dan *Ambiguity*) saat ini.

Dalam rangka memperkuat Tusi Sekretariat Daerah dan melaksanakan amanah kebijakan Pusat telah dilaksankan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan penyederhaaan birokrasi tersebut meliputi: penyederhanaan struktur organisasi; penyetaraan jabatan; dan penyesuaian sistem kerja. Pejabat struktural yang disetarkan umumnya menjadi analis kebijakan untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat secara efektif mengungkit hasil-hasil kinerja pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan yang dihasilkan dapat menyesuaikan terhadap kebutuhan penyelesaian permasalahan yang ada di msyarakat.

a. Tujuan Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Guna memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2025-2029 ditetapkan dua tujuan Setda, yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah dan 2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintergrasi dan dinamis.

b. Sasaran Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan Sekretriat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka rumusan Sasaran yang akan di capai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

Tujuan pertama, Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah memiliki satu sasaran, yaitu: Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil. Sedangkan Tujuan kedua, Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintergrasi dan dinamis memiliki dua sasaran, yaitu:

1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan
2) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, Sekretariat Daerah dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 merumuskan sejumlah program, yaitu Sasaran "Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil" akan diwujudkan melalui tujuh program, yaitu: (1). Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; (2). Program Kesejahteraan Rakyat; (3). Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; (4). Program Perekonomian dan Pembagunan; (5). Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; (6). Program Kebijakan Administrasi Pembangunan; (7). Program Penataan Organisasi.

Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah" dan "Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah" keduanya diwujudkan melalui Program Administrasi Umum.

Adapun Tujuan dan Sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah		Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66,3	66,32	66,35	66,4	66,4	66,6	66,6	66,8	66,8
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	%	Na	Na	Na	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
		Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	%	Na	Na	Na	44	44	44	44	44	44
		Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	Na	Na	Na	37	37	37	37	37	37

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintergrasi dan dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	Na	76	76	76	76	76	76	76	76
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Na	82	82,5	83	84	85	86	87	87
	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah	Nilai MRI Perangkat Daerah	Angka	Na	Na	3	3	3	3	3	3	3

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Strategi merupakan serangkaian tahapan atau langkah yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (PD) akan dicapai. Sementara itu, kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran PD. Arah kebijakan dirancang untuk menjembatani strategi dengan sasaran secara lebih operasional, sehingga strategi yang disusun menjadi lebih spesifik, terfokus, konkret, dan dapat diterapkan. Selain itu, kebijakan berperan dalam mengarahkan pemilihan kegiatan agar sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Sekretariat Daerah pada konteks peningkatan kualitas kebijakan, memiliki kekuatan berupa dokumen rencana jangka memengah dan jangka pendek (tahunan) yang selalu dievaluasi dan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan namun memiliki kelemahan produk-produk kebijakan pembangunan yang belum senantiasa adaptif dan berorientasi hasil. Sedangkan peluang untuk yang ada yaitu adanya berbagai kebijakan Pemerintah Pusat yang berorientasi pada peningkatan kebijakan yang cepat, agile dan berorientasi hasil. Tantangan yang dihadapi berupa belum optimalnya sinergi sektor-sektor pembangunan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu, Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 merumuskan arah kebijakan antara lain memperkuat forum koordinasi antar perangkat daerah secara berkala dan tematik; penguatan kelembagaan perangkat daerah yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan; mendorong kolaborasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program prioritas daerah dan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terintegrasi dan berbasis digital.

Sekretariat Daerah pada konteks pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah, memiliki kekuatan berupa agenda untuk meningkatkan kualitas layanan melalui survei IKM secara periodik, tersedianya dokumen manajemen risiko dan dokumen rencana kinerja tahunan namun memiliki kelemahan hasil survei IKM, dokumen manajemen risiko dan rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kualitas pelayanan. Sedangkan peluang untuk yang ada yaitu adanya arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait reformasi pelayanan publik. Tantangan yang dihadapi berupa belum optimalnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan yang semakin berkualitas. Oleh karena itu, Renstra Sekretariat Daerah merumuskan arah kebijakan berupa peningkatan indeks kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah dan peningkatan efektifitas manajemen resiko melalui sinkronisasi agenda biro-biro lingkup Sekretariat Daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah	Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah	1. Memperkuat forum koordinasi antar-SKPD secara berkala dan tematik 2. Penguatan peran Sekertariat daerah dalam harmonisasi, sinkronisasi, dan pembentukan produk hukum daerah 3. Peningkatan sinergi kerja sama daerah, baik dalam negeri maupun luar negeri 4. Penguatan kelembagaan perangkat daerah yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan
		Meningkatkan koordinasi, sinergi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	1. Mendorong kolaborasi antar SKPD dalam pelaksanaan program prioritas daerah 2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja SKPD yang terintegrasi dan berbasis digital 3. Peningkatan tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas 4. Peningkatan kualitas pelayanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			publik yang cepat, transparan, dan terstandar 5. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mewujudkan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan daerah 6. Penguatan tata kelola BUMD yang sehat, profesional, dan berorientasi kinerja
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi digital untuk layanan dan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi untuk seluruh Biro	Digitalisasi Layanan Biro serta standarisasi dan optimalisasi proses bisnis layanan biro
	Meningkatnya manajemen risiko Sekretariat Daerah	Mengotimalkan peran Tim Manajemen Risiko dalam pengelolaan Risiko Setda	Pembudayaan risiko sebagai bagian dari tata kelola organisasi

3.3. Manajemen Risiko Strategis Sekretariat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagaimana tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	MOU tidak terlaks	12	Tidak sinkronnya tujuan antar Pemerintah Provinsi daerah dengan Pemerntahan Luar daerah	Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.	1. Pembahasan perencaaan kerja sama yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan para pihak	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan	2026
		Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	16	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi	Tertundanya penetapan lokasi pembangunan	1. Perubahan trase/desain	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan	2026
		Gagal tercapainya kesepakatan batas	16	Perbedaan persepsi atau kepentingan antar daerah	Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah	1.Melakukan Delineasi/koreksi garis batas daerah 2. Fasilitasi penyelesaian sengketa garis batas daeah antar Kab/kota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan	2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Kegagalan dalam fasilitasi penyelesaian perkara di pengadilan karena kelemahan dalam pembuktian	10	Kelemahan pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan	Potensi pengeluaran keuangan atau aset daerah karena putusan Pengadilan akibat kelemahan dalam pembuktian	- Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah - Meningkatkan kapasitas SDM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan	2026
	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan masih parsial	12	Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika regulasi	Rekomendasi kebijakan belum mendorong ketahanan pangan di Jawa Tengah	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
						- Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		
		Pembagian dividen yang tidak sesuai ketentuan	9	Adanya intervensi politis dalam proses pembahasan dividen untuk mengarahkan hasil pembagian laba	1. Proses pembahasan menjadi tidak objektif 2. Potensi kerugian daerah		Asisten Ekonomi dan Pembangunan	2026
		Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah atau program strategis tidak tercapai	12	1. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD kurang mendukung dalam upaya pencapaian indikator kinerja 2. Kebijakan yang tidak tepat sasaran atau adanya kebijakan yang	Penilaan kinerja pemerintah daerah turun	Menyusun rekomendasi hasil koordinasi dan pengendalian	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
				tumpang tindih antar OPD				
	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa	20	Kurangnya pemahaman mengenai metode pemilihan pengadaan barang/jasa	realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa	1. Melaksanakan Monev PBJ meliputi review RUP, pendampingan RUP dan Sosialisasi peraturan PBJ anggaran murni. 2. Melaksanakan Monev PBJ meliputi review RUP, pendampingan RUP dan Sosialisasi peraturan PBJ anggaran perubahan.	Asisten Administrasi	2026
		Perencanaan pengadaan tidak matang	16	- Pemahaman PA/KPA/PPK OPD yang belum seragam dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa - PA/KPA/PPK Kurang cermat dalam menetapkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)	- Menghambat pelaksanaan pengadaan barang jasa - berpotensi aduan	1. Sosialisasi Buku Saku Perencanaan PBJ 2. Penerapan Kertas Kerja Perencanaan Pengadaan Barang Jasa sampai dengan Pelaksanaan PBJ	Asisten Administrasi	2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Konsep kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	12	Perubahan regulasi belum tersosialisasi	Pemberian TPP tidak tepat sasaran	Penyusunan konsep TPP berbasis murni kelas jabatan, evidence sesuai yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dan dinamika manajemen kepegawaian dengan berpedoman terhadap ketersediaan anggaran Daerah	Asisten Administrasi	2026
		Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	12	Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat	Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan	Melaksanakan rakor/sosialisasi regulasi kelembagaan	Asisten Administrasi	2026
		Proses pembangunan ZI tidak berjalan	12	Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI	Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik	Sosialisasi dan Pencanangan pembangunan ZI kepada seluruh OPD	Asisten Administrasi	2026

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab IV, maka diperlukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja serta pendanaan indikatif tahun 2025-2029.

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pembangunan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 secara rinci tertuang dalam tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah *								**357.354.186.000**		**354.802.970.000**		**360.148.707.000**		**362.208.808.000**		**364.419.941.000**	**Sekretariat Daerah**	
				Indeks Kualitas Kebijakan *	Angka	66,32	66,4		66,4		66,6		66,6		66,8		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi							357.354.186.000		354.802.970.000		360.148.707.000		362.208.808.000		364.419.941.000	Sekretariat Daerah	
				Indeks kematangan Kebijakan Lingkup	**Angka**	**N/A**	**37**	**345.287.892.000**	**37**	**341.251.002.000**	**37**	**346.220.472.000**	**37**	**347.548.940.000**	**37**	**349.253.673.000**	**Sekretariat Daerah**	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI					**2.715.000.000**		**3.390.000.000**		**3.990.000.000**		**4.092.925.000**		**4.568.956.000**	**BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN**	
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang		Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti ***	%	N/A	100	1.035.000.000	100	1.450.000.000	100	1.740.000.000	100	1.707.925.000	100	1.786.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah ****					1.035.000.000		1.450.000.000		1.740.000.000		1.707.925.000		1.786.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kerjasama antar		Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti ****	%	N/A	100	500.000.000	100	700.000.000	100	760.000.000	100	697.925.000	100	710.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah *****					500.000.000		700.000.000		760.000.000		697.925.000		710.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi *****	Dokumen	N/A	8	380.000.000	9	450.000.000	10	460.000.000	11	465.000.000	12	470.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi kerjasama antar pemerintah dalam
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah		Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri *****	Dokumen	N/A	4	120.000.000	4	250.000.000	5	300.000.000	5	232.925.000	6	240.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi kerjasama antar pemerintah luar
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kerjasama antar		Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang	%	N/A	100	200.000.000	100	300.000.000	100	380.000.000	100	400.000.000	100	405.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta *****					200.000.000		300.000.000		380.000.000		400.000.000		405.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi *****	Dokumen	N/A	4	100.000.000	4	150.000.000	4	190.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi kerjasama lembaga badan usaha dan swasta dalam negeri
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	Dokumen	N/A	4	100.000.000	4	150.000.000	4	190.000.000	4	200.000.000	4	205.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasillitasi kerjasama lembaga badan usaha dan swasta luar negeri
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama		Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama	%	N/A	95	335.000.000	95	450.000.000	95	600.000.000	95	610.000.000	95	671.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama *****					335.000.000		450.000.000		600.000.000		610.000.000		671.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi *****	Laporan	N/A	4	135.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	205.000.000	4	256.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA evaluasi kerjasama luar
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi *****	Laporan	N/A	4	100.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	205.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Evaluasi kerjasama dalam
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri *****	%	N/A	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	205.000.000	100	210.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA fasilitasi ijin perjalanan luar negeri KDH WKDH 35 kab kota dan provinsi serta
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang		Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan,	%	N/A	100	900.000.000	100	1.040.000.000	100	1.180.000.000	100	1.200.000.000	100	1.220.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan ****					900.000.000		1.040.000.000		1.180.000.000		1.200.000.000		1.220.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Meningkatnya Kualitas rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang	Dokumen	N/A	8	900.000.000	8	1.040.000.000	8	1.180.000.000	8	1.200.000.000	8	1.220.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan *****					520.000.000		550.000.000		620.000.000		630.000.000		640.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan *****	Dokumen	N/A	4	520.000.000	4	550.000.000	4	620.000.000	4	630.000.000	4	640.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Kelurahan 35 kab
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum *****					180.000.000		220.000.000		260.000.000		265.000.000		270.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	N/A	4	180.000.000	4	220.000.000	4	260.000.000	4	265.000.000	4	270.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi terkait Pertanahan, Trantibum dan Aduan Masyarakat
			Fasilitasi Penataan Wilayah *****					200.000.000		270.000.000		300.000.000		305.000.000		310.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah *****	Dokumen	N/A	4	200.000.000	4	270.000.000	4	300.000.000	4	305.000.000	4	310.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi Penegasan Batas Daerah; Penyusunan Kode data: dan Rupa
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang		Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah ***	%	N/A	100	780.000.000	100	900.000.000	100	1.070.000.000	100	1.185.000.000	100	1.562.956.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Pelaksanaan Otonomi Daerah ****					780.000.000		900.000.000		1.070.000.000		1.185.000.000		1.562.956.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Meningkatnya Kualitas Tertib Administrasi KDH dan DPRD		Persentase layanan fasilitasi KDH dan	%	N/A	100	200.000.000	100	240.000.000	100	290.000.000	100	400.000.000	100	762.956.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD *****					200.000.000		240.000.000		290.000.000		400.000.000		762.956.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala	Dokumen	N/A	7	200.000.000	9	240.000.000	12	290.000.000	35	400.000.000	35	762.956.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasiltasi Adm KDH DPRD Ke
		Meningkatnya Kualitas Pengembangan Otonomi dan		Jumlah rekomendasi pelaksanaa	Dokumen	N/A	3	180.000.000	3	210.000.000	3	280.000.000	3	285.000.000	3	290.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan *****					180.000.000		210.000.000		280.000.000		285.000.000		290.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi	Dokumen	N/A	4	180.000.000	4	210.000.000	4	280.000.000	4	285.000.000	4	290.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasiltasi 35 kab kota dan
		Meningkatnya Kualitas Tertib Administrasi Evaluasi dan Penyelenggaraan		Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan	%	N/A	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	510.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan					400.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		510.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan	Laporan	N/A	37	400.000.000	37	450.000.000	37	500.000.000	37	500.000.000	37	510.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi penyusunan LPPD 35 kab kota dan
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					**340.259.994.000**		**334.905.700.000**		**337.315.700.000**		**338.265.700.000**		**339.215.700.000**	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**	
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dasar		Persentase capaian kinerja program Kesejahtera	%	N/A	85	825.000.000	86	825.000.000	87	825.000.000	88	825.000.000	89	825.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan					825.000.000		825.000.000		825.000.000		825.000.000		825.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Meningkatkan kualitas kebijakan		Jumlah rekomendasi kebijakan	Dokumen	N/A	4	825.000.000	4	825.000.000	4	825.000.000	4	825.000.000	4	825.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi,	Dokumen	N/A	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA TENGAH
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi,	Dokumen	N/A	4	185.000.000	4	185.000.000	4	185.000.000	4	185.000.000	4	185.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA TENGAH
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan	Dokumen	N/A	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi,	Dokumen	N/A	4	185.000.000	4	185.000.000	4	185.000.000	4	185.000.000	4	185.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA TENGAH
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan	Dokumen	N/A	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan Non		Persentase capaian kinerja program Kesejahtera	%	N/A	85	1.725.000.000	86	1.725.000.000	87	1.725.000.000	88	1.725.000.000	89	1.725.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar ****					1.725.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Meningkatkan kualitas kebijakan Non		Jumlah rekomendasi kebijakan	Dokumen	N/A	4	1.725.000.000	4	1.725.000.000	4	1.725.000.000	4	1.725.000.000	4	1.725.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan	Dokumen	N/A	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA TENGAH
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi				1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Dokumen	N/A	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	Dokumen	N/A	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan Fasilitas		Persentase fasilitas keagamaan dalam	%	N/A	63	337.709.994.000	64	332.355.700.000	65	334.765.700.000	66	335.715.700.000	67	336.665.700.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Fasilitasi Pembinaan Mental					337.709.994.000		332.355.700.000		334.765.700.000		335.715.700.000		336.665.700.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Meningkatnya kualitas Pembinaan Mental Spiritual		Prosentase realisasi hibah keagamaan sesuai	%	N/A	85	333.000.000.000	85	328.450.000.000	85	331.030.000.000	90	331.936.000.000	90	332.801.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual *****					333.000.000.000		328.450.000.000		331.030.000.000		331.936.000.000		332.801.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terkelolanya Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	N/A	2500	332.550.000.000	2500	328.000.000.000	2500	330.580.000.000	2500	331.486.000.000	2500	332.351.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA
		Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual		Jumlah dokumen laporan pelaksanaa	Dokumen	N/A	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Biro Kesejahteraan
		Meningkatnya kualitas Pembinaan		Prosentase pelaksanaan pelayanan	%	N/A	100	4.709.994.000	100	3.905.700.000	100	3.735.700.000	100	3.779.700.000	100	3.864.700.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual					4.709.994.000		3.905.700.000		3.735.700.000		3.779.700.000		3.864.700.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan		Jumlah Lembaga Bina	Lembaga	N/A	4	2.559.994.000	4	1.755.700.000	4	1.585.700.000	4	1.629.700.000	4	1.714.700.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan	Dokumen	N/A	1	2.150.000.000	1	2.150.000.000	1	2.150.000.000	1	2.150.000.000	1	2.150.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA TENGAH
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM ***					**2.312.898.000**		**2.955.302.000**		**4.914.772.000**		**5.190.315.000**		**5.469.017.000**	**BIRO HUKUM**	
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah		Indeks Reformasi Hukum ***	Angka	91,4	92	843.129.000	92,5	1.065.401.000	93	1.727.843.000	93,5	1.820.974.000	94	1.961.744.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan ****					843.129.000		1.065.401.000		1.727.843.000		1.820.974.000		1.961.744.000	BIRO HUKUM	
		Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum Daerah		Presentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan	%	N/A	89,5	456.963.000	90	582.917.000	90,5	944.693.000	91	1.019.824.000	91,5	1.115.730.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan					456.963.000		582.917.000		944.693.000		1.019.824.000		1.115.730.000	BIRO HUKUM	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum		Jumlah Produk Hukum	Dokumen	N/A	40	456.963.000	45	582.917.000	50	944.693.000	55	1.019.824.000	60	1.115.730.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM JAWA TENGAH, JAWA
		Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum Daerah		Presentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan	%	N/A	91	64.361.000	92	82.110.000	93	140.975.000	94	144.148.000	95	157.172.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan *****					64.361.000		82.110.000		140.975.000		144.148.000		157.172.000	BIRO HUKUM	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum		Jumlah Produk Hukum	Dokumen	N/A	250	64.361.000	300	82.110.000	350	140.975.000	400	144.148.000	450	157.172.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM JAWA TENGAH, JAWA
		Meningkatnya Kualitas Database Dokumentasi Produk Hukum Daerah		Presentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui	%	N/A	91	175.530.000	92	220.545.000	93	355.727.000	94	367.725.000	95	388.080.000	BIRO HUKUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya *****					175.530.000		220.545.000		355.727.000		367.725.000		388.080.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum yang Didokumen	Dokumen	N/A	350	175.530.000	400	220.545.000	450	355.727.000	500	367.725.000	550	388.080.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
		Meningkatnya Kualitas Database Dokumentasi Produk Hukum Daerah		Presentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan	%	N/A	30	146.275.000	35	179.829.000	40	286.448.000	45	289.277.000	50	300.762.000	BIRO HUKUM	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya *****					146.275.000		179.829.000		286.448.000		289.277.000		300.762.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum yang dilakukan	Dokumen	N/A	13	146.275.000	14	179.829.000	15	286.448.000	16	289.277.000	17	300.762.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Kabupaten/ Kota		Persentase Efektifitas Pengawasan Produk	%	N/A	96	490.313.000	97	637.884.000	98	1.042.438.000	99	1.088.466.000	100	1.159.389.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan ****					490.313.000		637.884.000		1.042.438.000		1.088.466.000		1.159.389.000	BIRO HUKUM	
		Meningkatnya Pengawasan Produk Hukum Daerah		Presentase rancangan produk hukum	%	N/A	96	490.313.000	97	637.884.000	98	1.042.438.000	99	1.088.466.000	100	1.159.389.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota *****					490.313.000		637.884.000		1.042.438.000		1.088.466.000		1.159.389.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/	Dokumen	N/A	125	145.000.000	130	203.580.000	135	330.984.000	140	343.210.000	145	363.825.000	BIRO HUKUM	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH BIRO
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang	Dokumen	N/A	130	190.313.000	135	217.152.000	140	355.727.000	145	372.628.000	150	397.782.000	BIRO HUKUM	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH BIRO HUKUM
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang	Dokumen	N/A	130	155.000.000	135	217.152.000	140	355.727.000	145	372.628.000	150	397.782.000	BIRO HUKUM	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH BIRO HUKUM
		Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan		Capaian Pemberian Bantuan Hukum ***	%	N/A	100	827.916.000	100	1.058.616.000	100	1.815.052.000	100	1.941.588.000	100	1.959.804.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi Bantuan					827.916.000		1.058.616.000		1.815.052.000		1.941.588.000		1.959.804.000	BIRO HUKUM	
		Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara		Presentase bantuan hukum yang	%	N/A	100	827.916.000	100	1.058.616.000	100	1.815.052.000	100	1.941.588.000	100	1.959.804.000	BIRO HUKUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum *****					827.916.000		1.058.616.000		1.815.052.000		1.941.588.000		1.959.804.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian		Jumlah Masalah Hukum	Kasus	N/A	12	301.326.000	12	386.802.000	12	622.909.000	12	666.808.000	12	698.544.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM JAWA TENGAH, JAWA
		Terlaksananya bantuan hukum kepada masyarakat tidak		Jumlah Pemberian Bantuan Hukum	Kasus	N/A	340	526.590.000	340	671.814.000	340	1.192.143.000	340	1.274.780.000	340	1.261.260.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
		Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan		Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka	99,8	86	151.540.000	87	193.401.000	88	329.439.000	89	339.287.000	90	388.080.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi Bantuan					151.540.000		193.401.000		329.439.000		339.287.000		388.080.000	BIRO HUKUM	
		Meningkatnya Pelaksanaan HAM Daerah		Presentase Fasilitasi HAM	%	N/A	100	77.233.000	100	98.397.000	100	167.694.000	100	172.585.000	100	194.040.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM *****					77.233.000		98.397.000		167.694.000		172.585.000		194.040.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Fasilitasi Implementasi		Jumlah Fasilitasi Implementa	Laporan	N/A	4	77.233.000	4	98.397.000	4	167.694.000	4	172.585.000	4	194.040.000	BIRO HUKUM	35 Kabupaten/Kota, JAWA
		Meningkatnya Penyelesaian Penanganan masalah hukum		Presentase masalah hukum non litigasi yang	%	N/A	85	74.307.000	85	95.004.000	85	161.745.000	85	166.702.000	85	194.040.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM *****					74.307.000		95.004.000		161.745.000		166.702.000		194.040.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non		Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM	Kasus	N/A	20	74.307.000	20	95.004.000	20	161.745.000	20	166.702.000	20	194.040.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
				Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi	**Angka**	**N/A**	**44**	**8.047.952.000**	**44**	**8.845.000.000**	**44**	**8.997.000.000**	**44**	**9.484.000.000**	**44**	**9.730.000.000**	**Sekretariat Daerah**	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ***					**2.647.952.000**		**3.335.000.000**		**3.430.000.000**		**3.490.000.000**		**3.550.000.000**	**BIRO PEREKONOMIAN**	
		Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro	%	N/A	80	347.000.000	80	485.000.000	80	500.000.000	80	515.000.000	80	520.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					347.000.000		485.000.000		500.000.000		515.000.000		520.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Meningkatnya kualitas koordinasi		Jumlah dokumen rekomendas	Dokumen	N/A	4	347.000.000	4	485.000.000	4	500.000.000	4	515.000.000	4	520.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro *****					347.000.000		485.000.000		500.000.000		515.000.000		520.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	N/A	4	347.000.000	4	485.000.000	4	500.000.000	4	515.000.000	4	520.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN Koordinasi, Monitoring dan
		Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro		Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian,	%	N/A	85	797.000.000	85	1.000.000.000	85	1.050.000.000	85	1.065.000.000	85	1.080.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					797.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.065.000.000		1.080.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Meningkatkan kualitas kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdaganga	Dokumen	N/A	4	797.000.000	4	1.000.000.000	4	1.050.000.000	4	1.065.000.000	4	1.080.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro *****					797.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.065.000.000		1.080.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	N/A	4	450.000.000	4	525.000.000	4	570.000.000	4	580.000.000	4	585.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN Koordinasi, Monitoring dan
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan	Dokumen	N/A	4	347.000.000	4	475.000.000	4	480.000.000	4	485.000.000	4	495.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang		Persentase capaian kinerja program	%	N/A	85	338.000.000	85	430.000.000	85	435.000.000	85	445.000.000	85	460.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam ****					338.000.000		430.000.000		435.000.000		445.000.000		460.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan		Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan	Dokumen	N/A	2	338.000.000	2	430.000.000	2	435.000.000	2	445.000.000	2	460.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan					338.000.000		430.000.000		435.000.000		445.000.000		460.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisas	Dokumen	N/A	4	338.000.000	4	430.000.000	4	435.000.000	4	445.000.000	4	460.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang		Persentase capaian kinerja program	%	N/A	85	347.000.000	85	465.000.000	85	475.000.000	85	480.000.000	85	490.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam ****					347.000.000		465.000.000		475.000.000		480.000.000		490.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan		Jumlah rekomendasi kebijakan Energi	Dokumen	N/A	2	347.000.000	2	465.000.000	2	475.000.000	2	480.000.000	2	490.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					347.000.000		465.000.000		475.000.000		480.000.000		490.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Dokumen	N/A	4	347.000.000	4	465.000.000	4	475.000.000	4	480.000.000	4	490.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian,		Persentase capaian kinerja program bidang	%	N/A	87	818.952.000	87	955.000.000	87	970.000.000	87	985.000.000	87	1.000.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam ****					818.952.000		955.000.000		970.000.000		985.000.000		1.000.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi		Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian ****	Dokumen	N/A	2	301.452.000	2	340.000.000	2	345.000.000	2	350.000.000	2	355.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan					301.452.000		340.000.000		345.000.000		350.000.000		355.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan	Dokumen	N/A	4	301.452.000	4	340.000.000	4	345.000.000	4	350.000.000	4	355.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan		Jumlah Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai	Laporan	N/A	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi		Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan ****	Dokumen	N/A	2	277.500.000	2	315.000.000	2	320.000.000	2	325.000.000	2	330.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan					277.500.000		315.000.000		320.000.000		325.000.000		330.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisas	Dokumen	N/A	4	277.500.000	4	315.000.000	4	320.000.000	4	325.000.000	4	330.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi		Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan,	Dokumen	N/A	4	240.000.000	4	300.000.000	4	305.000.000	4	310.000.000	4	315.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan					240.000.000		300.000.000		305.000.000		310.000.000		315.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisas	Dokumen	N/A	8	240.000.000	8	300.000.000	8	305.000.000	8	310.000.000	8	315.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ***					**2.075.000.000**		**2.185.000.000**		**2.202.000.000**		**2.219.000.000**		**2.315.000.000**	**BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH**	
		Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan		Persentase ROA (Return On Aset) BUMD	%	N/A	1,95	875.000.000	2	915.000.000	2,05	922.000.000	2,08	930.000.000	2,1	955.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan					875.000.000		915.000.000		922.000.000		930.000.000		955.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi kebijakan BUMD		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengemban	Dokumen	N/A	4	875.000.000	4	915.000.000	4	922.000.000	4	930.000.000	4	955.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan					875.000.000		915.000.000		922.000.000		930.000.000		955.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi	Dokumen	N/A	4	475.000.000	4	490.000.000	4	495.000.000	4	500.000.000	4	505.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan	Dokumen	N/A	4	400.000.000	4	425.000.000	4	427.000.000	4	430.000.000	4	450.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha		Persentase ROA (Return On Aset) BUMD	%	N/A	2,3	800.000.000	2,5	840.000.000	2,65	850.000.000	2,85	857.000.000	3	900.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan					800.000.000		840.000.000		850.000.000		857.000.000		900.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi kebijakan BUMD		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengemban	Dokumen	N/A	4	800.000.000	4	840.000.000	4	850.000.000	4	857.000.000	4	900.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum,					800.000.000		840.000.000		850.000.000		857.000.000		900.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi	Dokumen	N/A	4	400.000.000	4	420.000.000	4	425.000.000	4	430.000.000	4	450.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan	Dokumen	N/A	4	400.000.000	4	420.000.000	4	425.000.000	4	427.000.000	4	450.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Meningkatnya capaian kinerja BLUD		Persentase nilai kemandirian BLUD ***	%	N/A	55	400.000.000	55,25	430.000.000	55,6	430.000.000	55,75	432.000.000	56	460.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan					400.000.000		430.000.000		430.000.000		432.000.000		460.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan korodinasi		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan	Dokumen	N/A	2	200.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	2	230.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian					200.000.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000		230.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Dokumen	N/A	2	200.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	2	230.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan korodinasi		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan	Dokumen	N/A	2	200.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	2	217.000.000	2	230.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah					200.000.000		215.000.000		215.000.000		217.000.000		230.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan	Dokumen	N/A	2	200.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	2	217.000.000	2	230.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA					**3.325.000.000**		**3.325.000.000**		**3.365.000.000**		**3.775.000.000**		**3.865.000.000**	**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan		Persentase realisasi bantuan keuangan ***	%	85	86	1.000.000.000	87	1.000.000.000	88	1.000.000.000	89	1.100.000.000	90	1.110.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ****					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.110.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan	Dokumen	N/A	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.100.000.000	4	1.110.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah *****					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.110.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administras	Laporan	N/A	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	550.000.000	4	560.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Pengendalian Kab/Kota Wilayah I, JAWA TENGAH
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administras	Laporan	N/A	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	550.000.000	4	550.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Pengendalian Kab/Kota Wilayah II, JAWA TENGAH
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis		Persentase tingkat ketercapaian kinerja	%	N/A	86,5	300.000.000	87	300.000.000	87,5	300.000.000	88	325.000.000	88,5	335.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ****					300.000.000		300.000.000		300.000.000		325.000.000		335.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kualitas pelaporan dan evaluasi		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	N/A	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	325.000.000	4	335.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan					300.000.000		300.000.000		300.000.000		325.000.000		335.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Analisis	Dokumen	N/A	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	325.000.000	4	335.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Evaluasi Kinerja
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangun	%	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	560.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ****					500.000.000		500.000.000		500.000.000		550.000.000		560.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan teknis		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis	Dokumen	N/A	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	560.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah *****					325.000.000		325.000.000		325.000.000		350.000.000		360.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa	Laporan	N/A	4	325.000.000	4	325.000.000	4	325.000.000	4	350.000.000	4	360.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Pelaporan APBD
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan					175.000.000		175.000.000		175.000.000		200.000.000		200.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan	Dokumen	N/A	4	175.000.000	4	175.000.000	4	175.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN IKU Daerah Jawa Tengah, JAWA
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi		Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan	%	N/A	90	1.525.000.000	91	1.525.000.000	92	1.565.000.000	93	1.800.000.000	94	1.860.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ****					1.525.000.000		1.525.000.000		1.565.000.000		1.800.000.000		1.860.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan	Dokumen	N/A	4	1.525.000.000	4	1.525.000.000	4	1.565.000.000	4	1.800.000.000	4	1.860.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD *****					1.325.000.000		1.325.000.000		1.355.000.000		1.550.000.000		1.600.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia yang		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	Laporan	N/A	12	475.000.000	12	475.000.000	12	485.000.000	12	550.000.000	12	560.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang bersumber dari		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaa	Laporan	N/A	12	250.000.000	12	250.000.000	12	260.000.000	12	300.000.000	12	310.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang infrastruktur yang bersumber dari APBD		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaa	Laporan	N/A	12	200.000.000	12	200.000.000	12	210.000.000	12	250.000.000	12	260.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	Laporan	N/A	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	450.000.000	4	470.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN *****					200.000.000		200.000.000		210.000.000		250.000.000		260.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administras	Laporan	N/A	4	200.000.000	4	200.000.000	4	210.000.000	4	250.000.000	4	260.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Pengendalian Pembangunan OPD yang bersumber
				Indeks kematangan Kebijakan	**Angka**	**N/A**	**29,5**	**4.018.342.000**	**29,5**	**4.706.968.000**	**29,5**	**4.931.235.000**	**29,5**	**5.175.868.000**	**29,5**	**5.436.268.000**	**Sekretariat Daerah**	
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI ***					**1.739.028.000**		**2.144.018.000**		**2.344.018.000**		**2.461.268.000**		**2.601.268.000**	**BIRO ORGANISASI**	
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah		Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematanga	%	66	71	257.352.000	72	322.352.000	73	347.352.000	74	364.102.000	75	384.102.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan ****					257.352.000		322.352.000		347.352.000		364.102.000		384.102.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya efektifitas penataan kelembagaan dan analisis jabatan di Jawa Tengah		Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi ****	Dokumen	4	2	257.352.000	2	322.352.000	2	347.352.000	2	364.102.000	2	384.102.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi *****					257.352.000		322.352.000		347.352.000		364.102.000		384.102.000	BIRO ORGANISASI	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi *****	Dokumen	N/A	2	150.000.000	2	200.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Kelembagaan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah laporan fasilitasi penilaian tingkat kematangan organisasi *****	Laporan	N/A	2	107.352.000	2	122.352.000	2	122.352.000	2	139.102.000	2	159.102.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Kematangan OPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah		Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya ***	%	85,71	91,43	207.400.000	91,43	272.400.000	91,43	297.400.000	91,43	314.150.000	91,43	334.150.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan ****					207.400.000		272.400.000		297.400.000		314.150.000		334.150.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya efektifitas penataan kelembagaan dan analisis jabatan di Jawa Tengah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota ****	Dokumen	4	1	207.400.000	1	272.400.000	1	297.400.000	1	314.150.000	1	334.150.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota *****					207.400.000		272.400.000		297.400.000		314.150.000		334.150.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota *****	Dokumen	N/A	4	207.400.000	4	272.400.000	4	297.400.000	4	314.150.000	4	334.150.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Kelembagaan Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif ***	%	92	92	207.800.000	92	272.800.000	92	297.800.000	92	314.550.000	92	334.550.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan ****					207.800.000		272.800.000		297.800.000		314.550.000		334.550.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya efektifitas penataan kelembagaan dan analisis jabatan di Jawa Tengah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota ****	Dokumen	4	1	207.800.000	1	272.800.000	1	297.800.000	1	314.550.000	1	334.550.000	BIRO ORGANISASI	
			Penataan Analisis Jabatan *****					207.800.000		272.800.000		297.800.000		314.550.000		334.550.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan *****	Dokumen	N/A	4	207.800.000	4	272.800.000	4	297.800.000	4	314.550.000	4	334.550.000	BIRO ORGANISASI	Analis Jabatan OPD dan Kab/Kota, JAWA TENGAH BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah		Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A ***	%	N/A	59,52	140.000.000	66,66	155.000.000	64,28	180.000.000	69,04	196.750.000	73,8	216.750.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ****					140.000.000		155.000.000		180.000.000		196.750.000		216.750.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD ****	Dokumen	4	2	140.000.000	2	155.000.000	2	180.000.000	2	196.750.000	2	216.750.000	BIRO ORGANISASI	
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *****					140.000.000		155.000.000		180.000.000		196.750.000		216.750.000	BIRO ORGANISASI	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *****	Dokumen	N/A	4	140.000.000	4	155.000.000	4	180.000.000	4	196.750.000	4	216.750.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Pembinaan RB OPD, JAWA TENGAH
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah		Persentase Kabupaten/ Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB ***	%	N/A	71,42	155.860.000	74,28	155.860.000	77,14	180.860.000	80	180.860.000	82,85	180.860.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ****					155.860.000		155.860.000		180.860.000		180.860.000		180.860.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota ****	Dokumen	4	2	155.860.000	2	155.860.000	2	180.860.000	2	180.860.000	2	180.860.000	BIRO ORGANISASI	
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *****					155.860.000		155.860.000		180.860.000		180.860.000		180.860.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Reformasi Birokrasi		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota *****	Dokumen	N/A	4	155.860.000	4	155.860.000	4	180.860.000	4	180.860.000	4	180.860.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Pembinaan RB Kab/Kota, JAWA TENGAH
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat ***	%	64,28	70	235.160.000	70	300.150.000	70	325.150.000	70	341.900.000	70	361.900.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ****					235.160.000		300.150.000		325.150.000		341.900.000		361.900.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah		Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya ****	Dokumen	4	2	235.160.000	2	300.150.000	2	325.150.000	2	341.900.000	2	361.900.000	BIRO ORGANISASI	
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja *****					235.160.000		300.150.000		325.150.000		341.900.000		361.900.000	BIRO ORGANISASI	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja *****	Dokumen	N/A	2	125.000.000	2	175.000.000	2	200.000.000	2	203.000.000	2	203.000.000	BIRO ORGANISASI	AKIP OPD dan KAb/Kota, JAWA TENGAH BIRO ORGANISASI
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Jumlah fasilitasi pembangunan zona integritas unit kerja dan Kab/Kota *****	Laporan	N/A	15	110.160.000	15	125.150.000	15	125.150.000	15	138.900.000	15	158.900.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Zona Integritas unit kerja dan Kab/Kota, JAWA TENGAH
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah		Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan ***	%	57,7	93	271.140.000	94	336.140.000	95	361.140.000	96	377.890.000	97	397.890.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ****					271.140.000		336.140.000		361.140.000		377.890.000		397.890.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan ****	Dokumen	4	2	271.140.000	2	336.140.000	2	361.140.000	2	377.890.000	2	397.890.000	BIRO ORGANISASI	
			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan *****					271.140.000		336.140.000		361.140.000		377.890.000		397.890.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan *****	Dokumen	N/A	4	271.140.000	4	336.140.000	4	361.140.000	4	377.890.000	4	397.890.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Tatalaksana UPP dan Kab/Kota, JAWA TENGAH
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah		Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas ***	%	N/A	39,21	264.316.000	45,75	329.316.000	52,28	354.316.000	58,82	371.066.000	65,35	391.066.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ****					264.316.000		329.316.000		354.316.000		371.066.000		391.066.000	BIRO ORGANISASI	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik ****	Dokumen	4	2	264.316.000	2	329.316.000	2	354.316.000	2	371.066.000	2	391.066.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik *****					264.316.000		329.316.000		354.316.000		371.066.000		391.066.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik *****	Dokumen	N/A	4	264.316.000	4	329.316.000	4	354.316.000	4	371.066.000	4	391.066.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI UPP dan Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ***					**2.279.314.000**		**2.562.950.000**		**2.587.217.000**		**2.714.600.000**		**2.835.000.000**	**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa		Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa ***	%	N/A	92	1.112.084.000	93	1.226.300.000	94	1.236.725.000	95	1.290.500.000	96	1.345.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa ****					1.112.084.000		1.226.300.000		1.236.725.000		1.290.500.000		1.345.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan strategi, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa		Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa ****	Dokumen	N/A	4	1.112.084.000	4	1.226.300.000	4	1.236.725.000	4	1.290.500.000	4	1.345.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa *****					526.584.000		550.000.000		552.000.000		565.000.000		575.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa *****	Laporan	N/A	12	526.584.000	12	550.000.000	12	552.000.000	12	565.000.000	12	575.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta bagi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa *****					320.500.000		370.900.000		373.000.000		390.000.000		410.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa *****	Laporan	N/A	4	180.000.000	4	210.300.000	4	211.000.000	4	220.000.000	4	230.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		Terlaksananya pengelolaan e-katalog lokal		Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal *****	Laporan	N/A	4	140.500.000	4	160.600.000	4	162.000.000	4	170.000.000	4	180.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Meningkatnya kualitas pengelolaan strategi, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa		Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif ****	%	N/A	75	265.000.000	75	305.400.000	75	311.725.000	75	335.500.000	75	360.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa *****					265.000.000		305.400.000		311.725.000		335.500.000		360.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa *****	Laporan	N/A	4	190.000.000	4	220.000.000	4	225.000.000	4	240.000.000	4	255.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan di Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DKI JAKARTA
		Terlaksananya kualitas dokumen SHB		Jumlah Laporan Penyusunan SHB *****	Laporan	N/A	2	75.000.000	2	85.400.000	2	86.725.000	2	95.500.000	2	105.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah Fasilitasi Penyusunan SHB Bagi SKPD Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik		Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik ***	%	N/A	85	556.900.000	86	654.350.000	88	658.700.000	90	695.900.000	91	735.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ****					556.900.000		654.350.000		658.700.000		695.900.000		735.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa		Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa ****	Dokumen	N/A	4	556.900.000	4	654.350.000	4	658.700.000	4	695.900.000	4	735.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik *****					176.000.000		223.300.000		225.000.000		230.000.000		245.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik *****	Laporan	N/A	4	176.000.000	4	223.300.000	4	225.000.000	4	230.000.000	4	245.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bagi seluruh SKPD Provinsi dan Pelaku UMKM dan UMKK di Provinsi Jawa Tengah., JAWA TENGAH
			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa *****					250.400.000		280.700.000		282.700.000		305.900.000		320.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa *****	Laporan	N/A	4	250.400.000	4	280.700.000	4	282.700.000	4	305.900.000	4	320.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa SKPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa *****					130.500.000		150.350.000		151.000.000		160.000.000		170.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa *****	Laporan	N/A	4	130.500.000	4	150.350.000	4	151.000.000	4	160.000.000	4	170.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		Meningkatnya Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM		Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ ***	%	N/A	83	610.330.000	85	682.300.000	86	691.792.000	88	728.200.000	90	755.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa ****					610.330.000		682.300.000		691.792.000		728.200.000		755.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Meningkatnya kualitas pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan serta pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa		Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa ****	Dokumen	N/A	4	610.330.000	4	682.300.000	4	691.792.000	4	728.200.000	4	755.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa *****					125.000.000		142.300.000		143.792.000		152.900.000		160.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa *****	Orang	N/A	8	125.000.000	8	142.300.000	8	143.792.000	8	152.900.000	8	160.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Pelaksanaan Pembinaan, Bimtek dam Workshop SDM PBJ di Pemprov Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa *****					175.330.000		215.000.000		218.000.000		225.300.000		235.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa *****	Dokumen	N/A	4	175.330.000	4	215.000.000	4	218.000.000	4	225.300.000	4	235.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Pembinaan Kelembagaan melalui pendampingan, sosialisasi dan Bintek Kelembagan UKPBJ Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah., JAWA TENGAH
			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa *****					310.000.000		325.000.000		330.000.000		350.000.000		360.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa *****	Dokumen	N/A	4	310.000.000	4	325.000.000	4	330.000.000	4	350.000.000	4	360.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Pendampingan Hukum dan permasalahan PBJ serta Bimbingan Hukum Bidang Pengadaan Barjas untuk SKPD Pemerintah Provinsi Jawa tengah, JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelolaperangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Daerah *								**257.107.143.000**		**280.256.729.000**		**308.267.626.000**		**338.696.850.000**		**372.193.418.000**	**Sekretariat Daerah**	
				Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah *	Angka	76	76		76		76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah **							256.857.143.000		280.006.729.000		308.017.626.000		338.361.850.000		371.848.418.000	Sekretariat Daerah	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah **	Angka	82	83	256.857.143.000	84	280.006.729.000	85	308.017.626.000	86	338.361.850.000	87	371.848.418.000	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					**252.801.804.000**		**275.444.013.000**		**302.988.415.000**		**333.287.256.000**		**366.615.982.000**	**BIRO UMUM**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah		**Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda** ***	**%**	**100**	**100**	**218.430.804.000**	**100**	**237.635.913.000**	**100**	**261.399.505.000**	**100**	**287.539.455.000**	**100**	**316.293.400.000**	**BIRO UMUM**	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					114.386.262.000		126.186.917.000		141.805.610.000		158.986.171.000		174.195.451.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	12	114.386.262.000	12	126.186.917.000	12	141.805.610.000	12	158.986.171.000	12	174.195.451.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					111.811.262.000		123.354.417.000		138.689.860.000		155.558.846.000		170.425.393.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	N/A	12	111.811.262.000	12	123.354.417.000	12	138.689.860.000	12	155.558.846.000	12	170.425.393.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****					2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	12	2.000.000.000	12	2.200.000.000	12	2.420.000.000	12	2.662.000.000	12	2.928.200.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****					450.000.000		495.000.000		544.500.000		598.950.000		658.845.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	12	450.000.000	12	495.000.000	12	544.500.000	12	598.950.000	12	658.845.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****					125.000.000		137.500.000		151.250.000		166.375.000		183.013.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	N/A	12	125.000.000	12	137.500.000	12	151.250.000	12	166.375.000	12	183.013.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****					800.000.000		880.000.000		968.000.000		1.064.800.000		1.171.280.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	12	800.000.000	12	880.000.000	12	968.000.000	12	1.064.800.000	12	1.171.280.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****					500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	732.050.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****					300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	N/A	12	300.000.000	12	330.000.000	12	363.000.000	12	399.300.000	12	439.230.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ****					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ****	Laporan	N/A	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	BIRO UMUM	
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	N/A	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					11.325.000.000		12.457.500.000		13.703.250.000		15.073.575.000		16.580.933.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Bagian Rumah Tangga Setda		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda ****	%	100	100	11.325.000.000	100	12.457.500.000	100	13.703.250.000	100	15.073.575.000	100	16.580.933.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****					550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		805.255.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	732.050.000	12	805.255.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		1.024.870.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	700.000.000	12	770.000.000	12	847.000.000	12	931.700.000	12	1.024.870.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		878.460.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	600.000.000	12	660.000.000	12	726.000.000	12	798.600.000	12	878.460.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					175.000.000		192.500.000		211.750.000		232.925.000		256.218.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	175.000.000	12	192.500.000	12	211.750.000	12	232.925.000	12	256.218.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****					300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	300.000.000	12	330.000.000	12	363.000.000	12	399.300.000	12	439.230.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					6.000.000.000		6.600.000.000		7.260.000.000		7.986.000.000		8.784.600.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	12	6.000.000.000	12	6.600.000.000	12	7.260.000.000	12	7.986.000.000	12	8.784.600.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					3.000.000.000		3.300.000.000		3.630.000.000		3.993.000.000		4.392.300.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	3.000.000.000	12	3.300.000.000	12	3.630.000.000	12	3.993.000.000	12	4.392.300.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****					14.700.000.000		16.170.000.000		17.787.000.000		19.565.700.000		25.211.605.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Paket	N/A	2	14.700.000.000	2	16.170.000.000	2	17.787.000.000	2	19.565.700.000	2	25.211.605.000	BIRO UMUM	
			Pengadaan Mebel *****					700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		1.024.870.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	700.000.000	4	770.000.000	4	847.000.000	4	931.700.000	4	1.024.870.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					14.000.000.000		15.400.000.000		16.940.000.000		18.634.000.000		24.186.735.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	30	14.000.000.000	40	15.400.000.000	40	16.940.000.000	40	18.634.000.000	40	24.186.735.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****					0		0		0		0		0	BIRO UMUM	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					30.826.448.000		33.909.093.000		37.300.002.000		41.030.002.000		45.133.003.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bagian Rumah Tangga Setda		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda ****	Laporan	N/A	12	30.826.448.000	12	33.909.093.000	12	37.300.002.000	12	41.030.002.000	12	45.133.003.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****					9.000.000.000		9.900.000.000		10.890.000.000		11.979.000.000		13.176.900.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	9.000.000.000	12	9.900.000.000	12	10.890.000.000	12	11.979.000.000	12	13.176.900.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					1.200.000.000		1.320.000.000		1.452.000.000		1.597.200.000		1.756.920.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	1.200.000.000	12	1.320.000.000	12	1.452.000.000	12	1.597.200.000	12	1.756.920.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****					20.626.448.000		22.689.093.000		24.958.002.000		27.453.802.000		30.199.183.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	20.001.448.000	12	22.001.593.000	12	24.201.752.000	12	26.621.927.000	12	29.284.120.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum *****	Laporan	N/A	12	125.000.000	12	137.500.000	12	151.250.000	12	166.375.000	12	183.013.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah *****	Laporan	N/A	2	500.000.000	2	550.000.000	2	605.000.000	2	665.500.000	2	732.050.000	BIRO UMUM	Biro umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					13.600.000.000		14.960.000.000		16.456.000.000		18.101.600.000		19.911.760.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	833	13.600.000.000	833	14.960.000.000	833	16.456.000.000	833	18.101.600.000	833	19.911.760.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****					400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	5	400.000.000	5	440.000.000	5	484.000.000	5	532.400.000	5	585.640.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					4.000.000.000		4.400.000.000		4.840.000.000		5.324.000.000		5.856.400.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	182	4.000.000.000	182	4.400.000.000	182	4.840.000.000	182	5.324.000.000	182	5.856.400.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pemeliharaan Mebel *****					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	30	100.000.000	30	110.000.000	30	121.000.000	30	133.100.000	30	146.410.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	300	2.000.000.000	300	2.200.000.000	300	2.420.000.000	300	2.662.000.000	300	2.928.200.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					6.500.000.000		7.150.000.000		7.865.000.000		8.651.500.000		9.516.650.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	17	6.500.000.000	17	7.150.000.000	17	7.865.000.000	17	8.651.500.000	17	9.516.650.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		878.460.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	300	600.000.000	300	660.000.000	300	726.000.000	300	798.600.000	300	878.460.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ****					32.743.094.000		33.017.403.000		33.319.143.000		33.651.057.000		34.016.163.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Bagian Rumah Tangga Setda		Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda ****	%	100	100	32.743.094.000	100	33.017.403.000	100	33.319.143.000	100	33.651.057.000	100	34.016.163.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****					2.743.094.000		3.017.403.000		3.319.143.000		3.651.057.000		4.016.163.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****	Orang/Bulan	N/A	2	2.743.094.000	2	3.017.403.000	2	3.319.143.000	2	3.651.057.000	2	4.016.163.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****					30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****	Orang/Bulan	N/A	2	30.000.000.000	2	30.000.000.000	2	30.000.000.000	2	30.000.000.000	2	30.000.000.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah		**Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan** ***	%	**100**	**100**	**8.611.000.000**	**100**	**9.472.100.000**	**100**	**10.419.310.000**	**100**	**11.461.241.000**	**100**	**12.607.366.000**	**BIRO UMUM**	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.244.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ****	%	100	100	35.000.000	100	38.500.000	100	42.350.000	100	46.585.000	100	51.244.000	BIRO UMUM	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.244.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	35.000.000	12	38.500.000	12	42.350.000	12	46.585.000	12	51.244.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ****	Laporan	N/A	12	40.000.000	12	44.000.000	12	48.400.000	12	53.240.000	12	58.564.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	40.000.000	12	44.000.000	12	48.400.000	12	53.240.000	12	58.564.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ****					236.000.000		259.600.000		285.560.000		314.116.000		345.528.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan		Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ****	%	100	100	236.000.000	100	259.600.000	100	285.560.000	100	314.116.000	100	345.528.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****					176.000.000		193.600.000		212.960.000		234.256.000		257.682.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan *****	Paket	N/A	8	176.000.000	8	193.600.000	8	212.960.000	8	234.256.000	8	257.682.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****					60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****	Orang	N/A	2	60.000.000	2	66.000.000	2	72.600.000	2	79.860.000	2	87.846.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah ****					7.800.000.000		8.580.000.000		9.438.000.000		10.381.800.000		11.419.980.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan ****	%	100	100	7.800.000.000	100	8.580.000.000	100	9.438.000.000	100	10.381.800.000	100	11.419.980.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah *****					3.500.000.000		3.850.000.000		4.235.000.000		4.658.500.000		5.124.350.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	3.500.000.000	12	3.850.000.000	12	4.235.000.000	12	4.658.500.000	12	5.124.350.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah *****					2.500.000.000		2.750.000.000		3.025.000.000		3.327.500.000		3.660.250.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	2.500.000.000	12	2.750.000.000	12	3.025.000.000	12	3.327.500.000	12	3.660.250.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah *****					1.800.000.000		1.980.000.000		2.178.000.000		2.395.800.000		2.635.380.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	1.500.000.000	12	1.650.000.000	12	1.815.000.000	12	1.996.500.000	12	2.196.150.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Staf Ahli Gubernur Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	300.000.000	N/A	330.000.000	N/A	363.000.000	N/A	399.300.000	N/A	439.230.000	BIRO UMUM	BIRO UMUM
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan ****					500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan		Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ****	Laporan	N/A	12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	732.050.000	BIRO UMUM	
			Penyiapan Materi Pimpinan *****					500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan		Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan *****	Dokumen	N/A	12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	732.050.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah		**Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol** ***	%	**100**	**100**	**25.760.000.000**	**100**	**28.336.000.000**	**100**	**31.169.600.000**	**100**	**34.286.560.000**	**100**	**37.715.216.000**	**BIRO UMUM**	
			Administrasi Umum Perangkat					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Bagian Humas dan Protokol		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol ****	%	100	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.500.000	4	66.550.000	4	73.205.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan ****					23.700.000.000		26.070.000.000		28.677.000.000		31.544.700.000		34.699.170.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan Bagian Humas dan Protokol		Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol ****	Laporan	N/A	12	23.700.000.000	12	26.070.000.000	12	28.677.000.000	12	31.544.700.000	12	34.699.170.000	BIRO UMUM	
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan *****					20.000.000.000		22.000.000.000		24.200.000.000		26.620.000.000		29.282.000.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan *****	Laporan	N/A	12	20.000.000.000	12	22.000.000.000	12	24.200.000.000	12	26.620.000.000	12	29.282.000.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan *****					3.700.000.000		4.070.000.000		4.477.000.000		4.924.700.000		5.417.170.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan *****	Laporan	N/A	12	3.700.000.000	12	4.070.000.000	12	4.477.000.000	12	4.924.700.000	12	5.417.170.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Fasilitasi Keprotokolan ****					1.960.000.000		2.156.000.000		2.371.600.000		2.608.760.000		2.869.636.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan fasilitasi keprotokolan		Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun ****	Laporan	N/A	12	1.960.000.000	12	2.156.000.000	12	2.371.600.000	12	2.608.760.000	12	2.869.636.000	BIRO UMUM	
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara *****					1.800.000.000		1.980.000.000		2.178.000.000		2.395.800.000		2.635.380.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara *****	Laporan	N/A	12	1.800.000.000	12	1.980.000.000	12	2.178.000.000	12	2.395.800.000	12	2.635.380.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****					110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		161.051.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****	Laporan	N/A	12	110.000.000	12	121.000.000	12	133.100.000	12	146.410.000	12	161.051.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan *****					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan *****	Laporan	N/A	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					**929.526.000**		**1.022.000.000**		**1.121.956.000**		**1.058.031.000**		**1.083.000.000**	**BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra		Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan ***	%	N/A	100	929.526.000	100	1.022.000.000	100	1.121.956.000	100	1.058.031.000	100	1.083.000.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					929.526.000		1.022.000.000		1.121.956.000		1.058.031.000		1.083.000.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra ****	%	N/A	100	929.526.000	100	1.022.000.000	100	1.121.956.000	100	1.058.031.000	100	1.083.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					880.000.000		910.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.020.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	450.000.000	12	470.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	510.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	OPD Provinsi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah bagi Biro pemotda KS di 35 kab kota dan provinsi lain, DKI JAKARTA
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat *****	Laporan	N/A	12	430.000.000	12	440.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	510.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	OPD Provinsi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di 35 kab kota dan provinsi lain, DKI JAKARTA
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					49.526.000		112.000.000		121.956.000		58.031.000		63.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	34.526.000	12	95.000.000	12	100.000.000	12	36.031.000	12	40.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	OPD Provinsi Pelaksanaan Penyusunan dokumen penatusahaan arsip dinamis bagi biro pemotda ks, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat *****	Dokumen	N/A	12	15.000.000	12	17.000.000	12	21.956.000	12	22.000.000	12	23.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	OPD Provinsi Pelaksanaan Penyusunan dokumen penatusahaan arsip dinamis bagi Asisten Pemkesra, JAWA TENGAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI * **					**387.694.000**		**466.790.000**		**717.136.000**		**723.189.000**		**740.163.000**	**BIRO HUKUM**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Hukum		Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum ***	%	100	100	387.694.000	100	466.790.000	100	717.136.000	100	723.189.000	100	740.163.000	BIRO HUKUM	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****					219.357.000		271.440.000		420.622.000		441.270.000		460.845.000	BIRO HUKUM	
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Hukum		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum ****	%	100	100	219.357.000	100	271.440.000	100	420.622.000	100	441.270.000	100	460.845.000	BIRO HUKUM	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****					219.357.000		271.440.000		420.622.000		441.270.000		460.845.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	1000	219.357.000	1100	271.440.000	1200	420.622.000	1300	441.270.000	1400	460.845.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
			Administrasi Umum Perangkat					168.337.000		195.350.000		296.514.000		281.919.000		279.318.000	BIRO HUKUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Hukum		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum ****	%	100	100	168.337.000	100	195.350.000	100	296.514.000	100	281.919.000	100	279.318.000	BIRO HUKUM	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					146.275.000		169.763.000		259.196.000		245.150.000		242.735.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	146.275.000	12	169.763.000	12	259.196.000	12	245.150.000	12	242.735.000	BIRO HUKUM	JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					22.062.000		25.587.000		37.318.000		36.769.000		36.583.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	22.062.000	12	25.587.000	12	37.318.000	12	36.769.000	12	36.583.000	BIRO HUKUM	JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI * **					**550.000.000**		**550.000.000**		**550.000.000**		**550.000.000**		**550.000.000**	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Kesejahteraan Rakyat		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat ***	%	N/A	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat ****	%	N/A	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	JAWA TENGAH OPD Provinsi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					**420.524.000**		**420.524.000**		**420.480.000**		**447.255.000**		**447.255.000**	**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Administrasi Pembangunan Daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah ***	%	100	100	420.524.000	100	420.524.000	100	420.480.000	100	447.255.000	100	447.255.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					420.524.000		420.524.000		420.480.000		447.255.000		447.255.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah ****	%	N/A	100	420.524.000	100	420.524.000	100	420.480.000	100	447.255.000	100	447.255.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					345.000.000		345.000.000		345.000.000		360.000.000		360.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	24	345.000.000	24	345.000.000	24	345.000.000	24	360.000.000	24	360.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	OPD Provinsi Penyelenggaraan koordinasi Biro Administrasi Pembangunan, JAWA TENGAH
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					75.524.000		75.524.000		75.480.000		87.255.000		87.255.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	16	75.524.000	16	75.524.000	16	75.480.000	16	87.255.000	16	87.255.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Arsip Biro Administrasi Pembangunan Daerah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN					**245.000.000**		**245.000.000**		**245.000.000**		**245.000.000**		**245.000.000**	**BIRO PEREKONOMIAN**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Perekonomian		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian ***	%	N/A	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Perekonomian		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian ****	%	N/A	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	OPD Provinsi Rapat internal, Koordinasi dan Konsultasi, JAWA TENGAH
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	OPD Provinsi Rapat internal, Koordinasi dan Konsultasi, JAWA TENGAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI * **					**655.000.000**		**718.000.000**		**730.030.000**		**742.351.000**		**794.418.000**	**BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan		Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan ***	%	N/A	100	655.000.000	100	718.000.000	100	730.030.000	100	742.351.000	100	794.418.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					655.000.000		718.000.000		730.030.000		742.351.000		794.418.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan ****	%	N/A	100	655.000.000	100	718.000.000	100	730.030.000	100	742.351.000	100	794.418.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					600.000.000		655.000.000		665.000.000		675.000.000		715.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	250.000.000	12	280.000.000	12	285.000.000	12	290.000.000	12	300.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan *****	Laporan	N/A	12	350.000.000	12	375.000.000	12	380.000.000	12	385.000.000	12	415.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					55.000.000		63.000.000		65.030.000		67.351.000		79.418.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	35.000.000	12	38.000.000	12	40.030.000	12	42.351.000	12	45.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan *****	Dokumen	N/A	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	34.418.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					**642.169.000**		**855.982.000**		**955.982.000**		**1.003.732.000**		**1.036.982.000**	**BIRO ORGANISASI**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, dan kepegawaian Perangkat Daerah di Biro Organisasi dan Asisten Administrasi		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi ***	%	N/A	100	642.169.000	100	855.982.000	100	955.982.000	100	1.003.732.000	100	1.036.982.000	BIRO ORGANISASI	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****					140.312.000		205.312.000		230.312.000		244.062.000		264.062.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Organisasi		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi ****	%	N/A	100	140.312.000	100	205.312.000	100	230.312.000	100	244.062.000	100	264.062.000	BIRO ORGANISASI	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****					0		0		0		0		0	BIRO ORGANISASI	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****					99.574.000		164.574.000		164.574.000		164.574.000		179.574.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	4	99.574.000	4	164.574.000	4	164.574.000	4	164.574.000	4	179.574.000	BIRO ORGANISASI	Kepegawaian Sekretariat Daerah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****					40.738.000		40.738.000		65.738.000		79.488.000		84.488.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	N/A	12	40.738.000	16	40.738.000	19	65.738.000	22	79.488.000	25	84.488.000	BIRO ORGANISASI	OPD Provinsi Pendidikan dan Pelatihan Setda Prov Jateng, JAWA TENGAH
			Administrasi Umum Perangkat					501.857.000		650.670.000		725.670.000		759.670.000		772.920.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi ****	%	N/A	100	501.857.000	100	650.670.000	100	725.670.000	100	759.670.000	100	772.920.000	BIRO ORGANISASI	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					451.596.000		560.000.000		625.000.000		645.000.000		655.000.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	181.596.000	12	230.000.000	12	270.000.000	12	280.000.000	12	285.000.000	BIRO ORGANISASI	Koordinasi pada Biro Organisasi, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi *****	Laporan	N/A	12	270.000.000	12	330.000.000	12	355.000.000	12	365.000.000	12	370.000.000	BIRO ORGANISASI	Koordinasi pada Asisten Administrasi, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					50.261.000		90.670.000		100.670.000		114.670.000		117.920.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	30.261.000	12	55.261.000	12	60.261.000	12	70.261.000	12	72.261.000	BIRO ORGANISASI	Biro Organisasi, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi *****	Dokumen	N/A	12	20.000.000	12	35.409.000	12	40.409.000	12	44.409.000	12	45.659.000	BIRO ORGANISASI	OPD Provinsi Penatausahaan arsip Asisten Administrasi, JAWA TENGAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI * **					**225.426.000**		**284.420.000**		**288.627.000**		**305.036.000**		**335.618.000**	**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa ***	%	N/A	100	225.426.000	100	284.420.000	100	288.627.000	100	305.036.000	100	335.618.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					225.426.000		284.420.000		288.627.000		305.036.000		335.618.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						Tahun	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ****	%	N/A	100	225.426.000	100	284.420.000	100	288.627.000	100	305.036.000	100	335.618.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					200.379.000		254.020.000		257.227.000		270.000.000		290.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	200.379.000	12	254.020.000	12	257.227.000	12	270.000.000	12	290.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di 35 Kab/Kota dan LKPP RI, DKI JAKARTA OPD Provinsi
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					25.047.000		30.400.000		31.400.000		35.036.000		45.618.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	25.047.000	12	30.400.000	12	31.400.000	12	35.036.000	12	45.618.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	OPD Provinsi Penatausahaan Arsip Dinamis pada di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Daerah **							**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**335.000.000**		**345.000.000**	Sekretariat Daerah	
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Daerah **	Angka	N/A	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	335.000.000	3	345.000.000	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI * **					**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**335.000.000**		**345.000.000**	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Sekretariat Daerah		Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah ***	%	N/A	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	335.000.000	100	345.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****					250.000.000		250.000.000		250.000.000		335.000.000		345.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi Sekretariat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	N/A	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	335.000.000	100	345.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		135.000.000		135.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	N/A	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	135.000.000	4	135.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	OPD Provinsi Perencanaan Biro-biro lingkup Sekretariat
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****					150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		210.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	N/A	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	200.000.000	6	210.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Evaluasi pelaksanaan APBD dan kinerja Biro-biro lingkup Setda

4.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun		TARGET CAPAIAN						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66,3	66,3	66,35	66,4	66,5	66,6	66,7	66,8	**IKU**
2	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	%	Na	Na	Na	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	**IKU**
3	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	%	Na	Na	Na	44	44	44	44	44	**IKU**
4	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	Na	Na	Na	37	37	37	37	37	**IKU**

Keterangan:
Na = merupakan indikator baru dan belum memiliki baseline

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

NO	Indikator Kinerja Kunci	Base Line Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif	Na	Na	Na	75	75	75	75	75	Biro PBJ

Keterangan:
Na = merupakan indikator baru dan belum memiliki baseline

Tabel
Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama					
1.	Pengembangan *sister province*	1. Evaluasi dan identifikasi program kerjasama 2. Implementasi joint working group sesuai bidang yang disepakati 3. Forum Kerjasama Sister Province (*Liaison Officer*)	20 negara selama 5 tahun	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama	Pemda Luar Negeri
2.	Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah	1. Penyusunan SK dan Peraturan Gubernur tindaklanjut Perda TJSLP; 2. Fasilitasi Rapat/Sosialisasi/Rakor identifikasi pemetaan TJSLP; 3. Fasilitasi Rapat/Sosialisasi/Rakor verifikasi data TJSLP; 4. Monitoring dan evaluasi data TJSLP; 5. Pengembangan Aplikasi; 6. Fasilitasi Rapat/Sosialisasi/Rakor	Laporan pelaksanaan tahunan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha Sub Kegiatan:	Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama	1. Anggota Forum TJSLP Prov. Jateng

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
		Bisnis Forum TJSLP berdasarkan hasil pemetaan (Atas, Menengah, Kecil)				
3	Pemberdayaan Diaspora	1. Pemetaan potensi dan kebutuhan Pemprov Jawa Tengah sesuai prioritas Gubernur 2. Forum Diaspora (Negara Terpilih) dan menyusun program kerja(work plan) 3. Pelaksanaan program kerja di bidang Ekonomi (trade, investment and SMEs), Pendidikan, Tenaga kerja dan Promosi Budaya) 4. perluasan networking dengan INGO	12 Negara selama 5 tahun	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha	Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama	1. Perwakilan Negara Indonesia di Luar Negeri 2. Perwakilan Negara Asing di Indonesia 3. Komunitas Masyarakat di dalam dan luar negeri 4. Investor Asing 5. International Non Government Organization
	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan					
4.	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah	Rapat koordinasi dan monitoring	Teridentifikasinya santri lulusan pondok	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan	Biro Kesra	Kanwil Kemenag Jateng, Dinas Pendidikan

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
	dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta			Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Faslitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan keagamaan		
5	Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren	1. Pembuatan Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah 2. Rapat koordinasi dan monitoring 3. Fasilitasi hibah peningkatan sarana prasarana ponpes	Peningkatan kualitas pesantren dan SDM pesantren Target : 5.364 pesantren / 100.000 santri	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Faslitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan keagamaan	Biro Kesra	Kanwil Kemenag Jateng
6.	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru,	1. Pemberian hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan untuk peningkatan kualitas sarpras pendidikan	Membantu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di lembaga pendidikan	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan,	Biro Kesra	Kanwil Kemenag Jateng

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
	pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	2. Rapat koordinasi dan monitoring	keagamaan, sehingga proses Kegiatan Belajar Mengajar dapat berjalan dengan optimal Target : lembaga pendidikan keagamaan Volume : 2.000 lembaga pendidikan keagamaan	Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Faslitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan		
7.	BOSDa Madrasah Aliyah	1. Pemberian hibah kepada Madrasah Aliyah untuk mencukupi biaya operasional madrasah 2. Rapat koordinasi dan monitoring	Memenuhi kebutuhan biaya operasional di Madrasah Aliyah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Target : siswa MA volume : 200.000 siswa	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Faslitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan keagamaan	Biro Kesra	Kanwil Kemenag Jateng
8.	Peningkatan kualitas hidup lansia	Koordinasi, pemantauan & evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui pertemuan dengan unsur terkait	Laporan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup lansia	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Kegiatan	Biro Kesra	Dinas Sosial

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				: Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		
9.	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan **ketersediaan *day care* untuk buruh di Kawasan Industri**	1. Monev ketersediaan *daycare* untuk buruh di Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri; 2. Fasilitasi dan koordinasi terkait upaya pemenuhan daycare pada Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri	1. Laporan Monev ketersediaan daycare untuk buruh di Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri 2. Laporan Fasilitasi dan koordinasi terkait upaya pemenuhan daycare pada Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat,	Biro Kesra	DP3AKB, Dinas Naker, Dinas Kesehatan, Kementrian Kesehatan, Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Biro Hukum					
10.	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan yang sedang menghadapi permasalahan hukum melalui LBH yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	100 Perkara	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum Bagian Bantuan Hukum dan HAM	• Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah • Bagian Hukum SETDA Kab/Kota
	Biro Perekonomian					
11.	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	1. Fasilitasi dan koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Laporan Fasilitasi dan koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Program Perekonomian dan Pembangunan; Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian; Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Disperindag	BPJPH

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
12.	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	1. Fasilitas penyusunan lembaga masyarakat ekonomi syariah 2. Fasilitasi penyusunan road map pengembangan ekonomi dan keuangan syariah	1. Terbentuknya kelembagaan KDEKS 2. Tersusunnya Roadmap	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1. Dinas Pariwisata	Bappeda Bank Indonesia
13.	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan *day care* untuk buruh di Kawasan Industri	1. Fasilitasi dan koordinasi pemberian Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi pemberian Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1. Dinas Pertanian dan Perkebunan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan	3. PT. JPEN

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
14.	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	1. Fasilitasi dan koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Disperindag	BPJPH
15.	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Fasilitasi dan koordinasi Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Disperindag	Bappeda
16.	Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	1. Fasilitasi dan Koordinasi Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	Laporan Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian /	1. Biro Kesra	Disperindag DiskopUKM

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		
17.	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	1. Fasilitasi dan Koordinasi Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Perekebunan	Jamkrida (Program Subsidi Suku Bunga)
18.	Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Fasilitasi dan koordinasi Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Laporan Fasilitasi dan koordinasi Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Sub Kegiatan:	Dinas Ketahanan Pangan	PT. JTAB

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
19.	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	Fasilitasi dan Koordinasi Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Perkebunan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Biro BUMD dan BLUD					
20.	Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima	1. Fasilitasi dan Koordinasi Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak	Surat Edaran Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3%	Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan, Pembinaan dan	Biro BUMD dan BLUD	1. Disnakertrans 2. Dinsos

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
	penyandang Disabilitas	3% dapat menerima penyandang Disabilitas	dapat menerima penyandang Disabilitas	Pengembangan BUMD Keuangan		
		2. Monitoring dan evaluasi ketersediaan pegawai BUMD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas.	Laporan Monitoring dan evaluasi ketersediaan pegawai BUMD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas.	Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan BUMD Jasa Produksi		
21.	Fasilitasi Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD	1. Penyusunan Pergub tentang Tata Kelola BUMD 2. Reformasi Struktur Organisasi 3. Peningkatan kompetensi SDM BUMD 4. Penyusunan Rencana Aksi Tata Kelola BUMD	1. Tersusunnya Pergub dan rencana aksi tentang Tata Kelola BUMD 2. Tersusunnya struktur organisasi dan peningkatan kompetensi BUMD	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMD Keuangan	Biro BUMD dan BLUD	-
22.	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Fasitasi dan Koordinasi Pembelian hasil panen petani dan nelayan	Laporan Fasitasi dan Koordinasi Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan:	Biro BUMD dan BLUD	1. Distanbun 2. Dishanpan 3. Dislutkan 4. Disperindag 5. PT JTAB

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
23.	Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (*E-Commerce*)	1. Penyusunan kajian kelayakan bisnis e-*Commerce* 2. Penyusunan regulasi jaringan pasar (ekspor-supermarket marketplace) milik Pemprov Jateng melalui BUMD (*E-Commerce*) 3. Fasilitasi dan Koordinasi dalam membuat platform E-Commerce **(nomor 2 dan 3 dilaksanakan apabila hasil kajian binis dinyatakan layak)**	1. Dokumen kajian kelayakan bisnis e-*Commerce;* 2. Dokumen regulasi e-*Commerce;* 3. Terbangunnya jaringan pasar (ekspor-supermarket *marketplace*) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (*E-Commerce*)	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Biro BUMD dan BLUD	Disperindag
	Biro Administrasi Pembangunan Daerah					
24.	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan	1. Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur melalui melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni 2. Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan	1. Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur melalui RTLH	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Kegiatan: Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan:	Dinas Perakim, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas BUMCK	Kolaborasi dalam menjalankan fungsi koordinasi dengan Bappeda, BPKAD dan Inspektorat

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
	Gelanggang Olah Raga Internasional	Pengembangan Pusat Rekreasi, dan 3. Koordinasi/Fasilitasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Gelanggang Olah Raga	2. Laporan Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Pusat Rekreasi, dan 3. Laporan Koordinasi/Fasilitasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Gelanggang Olah Raga	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		
	Biro Organisasi					
25.	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah	Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan rumah rakyat di kantor Gubernur Jalan Pahlawan dan 3 (tiga) gerai rumah rakyat di eks bakorwil dalam rangka menerima aduan, permintaan data informasi serta pelayanan publik lainnya	Penyelesaian aduan, data informasi dan pelayanan publik	Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ;sub kegiatan: fasilitasi pelayanan publik	Biro Organisasi (Pengarah fasilitasi pelayanan publik), Cabdin Pendidikan (Tempat dan Pelaksanan)	Biro Organisasi; Biro Umum dan Dinas Pendidikan
26.	Meningkatkan partisipasi	Penyusunan Kebijakan penggunaan baju adat daerah pada hari kamis minggu	Surat Edaran Sekda tentang penggunaan baju adat daerah	Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi	Biro Organisasi (Pengarah	Biro Organisasi; Biro Hukum.

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
	masyarakat dalam ekspresi budaya	pertama dalam 1 bulan sekali, HUT Provinsi Jateng dan acara ceremonial tertentu		Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ;sub kegiatan: Fasilitasi Ketatalaksanaan	Fasilitasi Ketatalaksanaan)	
27.	Peningkatan TPP ASN	Penyusunan kebijakan penunjang terkait TPP berbasis kinerja dan kelas jabatan	Dokumen kajian umum kebijakan TPP, Dokumen Pengukuran kinerja, Dokumen evaluasi implementasi TPP	Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan; Sub Kegiatan : Penataan Analisis Jabatan	Biro Organisasi (Pengarah Penataan Analisis Jabatan); BKD, BPKAD, Bappeda, Bappenda.	
28.	Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng	100 % OPD yang terfasilitasi	Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ;sub kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi (Pengarah Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja)	
	Biro Umum					
29.	Kantor Gubernur Rumah Rakyat	Membuka gerai rumah rakyat di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan	Terbangunnya gerai rumah rakyat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan; Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan	Biro Umum	Biro Umum Biro Organisasi

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Sekretariat Daerah; Sub Kegiatan: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		

BAB V
PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaras dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025-2029 serta sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah oleh Biro-Biro pada tahun 2025-2029 dalam mencapai Tujuan Sekretariat Daerah yaitu "Meningkatkan Kualitas Kebijakan" dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan.

Penetapan pagu pendanaan Rencana Strategis Sekretariat Derah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dilakukan berdasarkan proyeksi yang diberikan oleh TAPD Provinsi Jawa Tengah. Pagu tersebut dimungkinkan mengalami perubahan dikarenakan ketersediaan anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, perlu kiranya penyusunan Renja Tahunan dilakukan dengan cermat agar sasaran pembangunan tetap dapat tercapai pada akhir masa periode Rencana Strategis pada tahun 2029. Dalam hal ketersediaan anggaran apabila tidak mencukupi, maka biro-biro lingkup Setda perlu menentukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai. Inovasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pemanfaatan anggaran.

Kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan konstribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Lampiran Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

CASCADING SETDA 2025-2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Meningkatkan kualitas kebijakan daerah**	**Indeks Kualitas Kebijakan**	**Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil**	**ndeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kerjasama antar pemerintah, Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta.	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi
													Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri
										Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	Fasilitasi Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi
													Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri
									Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi
													Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi
													Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri
							Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan umum	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Fasilitasi Penataan Wilayah	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah
											Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
											Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Tertib Administrasi KDH dan DPRD	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
									Meningkatnya Kualitas Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan
									Meningkatnya Kualitas Tertib Administrasi Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
					PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Indeks Reformasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang - Undangan	Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Presentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang2 an	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun
										Presentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang2 an	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun
									Meningkatnya Kualitas Database Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Presentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya
										Presentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan			Jumlah Produk Hukum yang dilakukan Analisis dan Evaluasi
					PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Kab/ Kota	Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota		Meningkatnya Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Presentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi
													Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah II
													Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah III
					PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata/TUN	Presentase bantuan hukum yang tertangani	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Terlaksananya bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Jumlah Pemberian Bantuan Hukum
							Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Fasilitasi Bantuan Hukum	Meningkatnya Pelaksanaan HAM Daerah	Presentase Fasilitasi HAM Daerah	Fasilitasi Penyelesaian masalah hukum Non Litigasi dan HAM	Terlaksananya Fasilitasi Implementasi Kebijakan HAM	Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Daerah
									Meningkatnya Penyelesaian Penanganan masalah Hukum nonlitigasi	Presentase masalah hukum nonlitigasi yang tertangani		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Hukum Non Litigasi yang diselesaikan
					PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatkan kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas kebijakan Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
											Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
												Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
											Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
												Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Meningkatkan kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan Non dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas kebijakan Non Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
											Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Des
						Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan	Persentase rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang ditindaklanjuti		Meningkatnya kualitas fasilitasi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan	Jumlah rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
						Meningkatkan kualitas pelaksanaan Fasilitas Keagamaan dalam kondisi baik	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya kualitas Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola
													Jumlah dokumen laporan pelaksanaan hibah keagamaan
										Prosentase pelaksanaan pelayanan keagamaan	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi
												Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Meningkatkan kualitas Pelaksanaan kebijakan perekonomian makro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Meningkatkan kualitas kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
						Meningkatkan kualitas Pelaksanaan kebijakan perekonomian mikro	Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Meningkatkan kualitas kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
												Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
						Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
													Jumlah Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
										Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pangan
										Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
						Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
						Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral	Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Energi Sumber Daya Mineral	Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi kebijakan BUMD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Jasa Keuangan
													Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
						Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha			Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Non Keuangan
													Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
						Meningkatkan capaian kinerja BLUD	Persetase nilai kemandirian BLUD		Meningkatkan kualitas pelaksanaan korodinasi Kebijakan dan Koordinasi BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD
										Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
					PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD	Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia yang bersumber dari APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia yang bersumber dari APBD
												Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang infrastruktur yang bersumber dari APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang infrastruktur yang bersumber dari APBD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang PU dan Perhubungan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang PU dan Perhubungan
												Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang bersumber dari APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang bersumber dari APBD
											Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN	Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
						Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan Kewilayahan	Persentase realisasi bantuan keuangan		Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah	Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
													Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II
						Meningkatkan kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan daerah	Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
											Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah
							Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daera	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan
				Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	**Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas pengelolaan strategi, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan iasa	Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
												Terlaksananya kualitas dokumen SHB	Jumlah Laporan Penyusunan SHB
										Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (4 Laporan)
												Terlaksananya pengelolaan e-katalog lokal	Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal
						Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
											Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
											Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
						Meningkatnya Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan serta pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
											Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
											Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
					PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Meningkatnya efektifitas penataan kelembagaan dan analisis jabatan di Jawa Tengah	Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Jumlah laporan fasilitasi penilaian tingkat kematangan organisasi
							Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya			Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
							Prosentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif			Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Penataan Analisis Jabatan	Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan
						Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kineria	Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
							Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota			Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota
							prosentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat			Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
										Jumlah dokumen fasilitasi pembangunan Zona Integritas Unit Kerja dan Kabupaten/Kota			Jumlah fasilitasi pembangunan zona integritas unit kerja dan Kab/Kota
						Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan		Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan
							Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintergrasi dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi keuangan	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
											Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
											Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
								Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Bagian Rumah Tangga Setda	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
											Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
											Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Biro Umum

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya layanana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
											Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
											Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
											Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bagian Rumah Tangga Setda	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
													Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah
													Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum
								Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Bagian Rumah Tangga Setda	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah
											Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah
							Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
											Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Biro Umum
								Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan
											Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
											Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan
													Jumlah Paket Kebutuhan Staf Ahli Gubernur Disediakan
								Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Penyiapan Materi Pimpinan	Terlaksananya penyiapan materi pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan
							Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan Bagian Humas dan Protokol	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol	Fasiltasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
											Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terlaksananya pengelolaan dokumentasi pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Bagian Humas dan Protokol	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
											Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
								Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya layanan fasilitasi keprotokolan	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
											Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya pengelolaan hubungan keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
													Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
													Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum Biro Hukum	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Hukum	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Hukum	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Keseiahteraan Rakvat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakvat	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Perekonomian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Perekonomian	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
													Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
													Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum Biro Adm. Bangda	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Adm. Bangda	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Adm. Bangda
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Adm. Bangda	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Adm. Bangda
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, dan kepegawaian Perangkat Daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
													Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
													Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Organisasi	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
											Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
											Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan
			Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah

Tabel
Idenifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA								
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	MoU tidak terlaksana	Risiko Strategis	Tidak sinkronnya tujuan antar Pemerintah Provinsi daerah dengan Pemerntahan Luar daerah	Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.	Pemprov
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	Risiko Strategis	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi	Tertundanya penetapan lokasi pembangunan	Instansi pengusul, masyarakat terdampak, Gubernur
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Gagal tercapainya kesepakatan batas	Risiko Strategis	Perbedaan persepsi atau kepentingan antar daerah	Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah	Pemkab/Pemkot, Masyarakat
4	Sasaran Program	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen LPPD tidak dapat disusun tepat waktu	Risiko Operasional	Keterlambatan pedoman teknis dari Kemendagri	Keterlambatan penyampaian LPPD ke pusat, mempengaruhi proses EPPD	Biro Pemotdaker
5	Sasaran Program	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Terlambatnya penyusunan atau revisi naskah kerja sama	Risiko Reputasi	Kurangnya komitmen dari anggota tim terhadap usulan kerjasama	Gagalnya inisiasi kerja sama dan menurunnya kepercayaan pihak luar negeri terhadap Jawa Tengah	Pemprov, Biro Pemotdaker
6	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	Usulan pengesahan DPRD tidak sesuai prosedur	Risiko Operasional	Kelengkapan berkas tidak sesuai dengan peratiran perundang-undangan	Tertundanya pengesahan penggantian antar waktu DPRD	Biro Pemotdaker, legislatif

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Daerah tidak dapat memenuhi target SPM	Risiko Operasional	Indikator SPM tidak sesuai dengan perencanaan daerah	Kinerja Pemerintahan Daerah dinilai kurang optimal	OPD teknis, Biro Pemotdaker
8	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau kegagalan dalam menjalankan kontrak kerjasama	Risiko Kemitraan	Tidak pahamnya OPD Provinsi dan Pemkab/Kot terhadap regulasi kemitraan	Berkurangnya kepercayaan mitra luar negeri terhadap Pemda	Pemprov, Publik
9	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan kerjasama luar negri kurang maksimal	Risiko Kemitraan	Kurangnya partisipasi Pemda terhadap pelaksanaan kerjasama	Menghambat aktivitas bisnis dan pembangunan	Pemprov, masyarakat
10	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah	Evaluas pelakasanaan kerjasama tidak dapat dilakukan	Risiko Operasional	Tidak ada instrumen Monev terkait pelaksaaan kerjasama	Tidak termonitornya pelaskaaan kerjasama di lingkup Pemprov Jawa Tengah	Pemprov
11	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Masyarakat merasa memiliki tanah negara atau tanah aset milik pemerintah	Risiko Operasional	Terjadi pembiaran penguasaaan aset pemerintah oleh masyarakat	Potensi konflik sosial dan pelanggaran hukum	Masyarakat terdampak, Gubernur
12	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Target sertifikasi tanah tidak tercapai	Risiko Operasional	Ketidaksinkronan data pertanahan & keterlambatan kebijakan daerah	Hak atas tanah masyarakat tidak jelas, sengketa tanah	Masyarakat penerima PTSL, Pemprov
13	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Gangguan ketertiban di kantor Gubernur	Risiko Operasional	Koordinasi pengamanan yang lemah	Terganggunya pelayanan dan keamanan lingkungan	Pengunjuk rasa, ASN, Pemprov
14	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Keterlambatan LKPJ	Risiko Operasional	Data dari OPD tidak lengkap atau lambat masuk	Rekomendasi DPRD tidak optimal, turunnya kepercayaan	Gubernur, DPRD, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Nama rupabumi tidak terbakukan	Risiko Operasional	Data tidak valid atau belum diverifikasi	Kesalahan pada peta atau dokumen resmi	Masyarakat, Pemda, Badan Informasi Geospasial
BIRO HUKUM								
16	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegagalan dalam fasilitasi penyelesaian perkara di pengadilan karena kelemahan dalam pembuktian	Risiko Legal	Kelemahan pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan	Potensi pengeluaran keuangan atau aset daerah karena putusan Pengadilan akibat kelemahan dalam pembuktian	OPD Provinsi Jawa Tengah
17	Sasaran Program	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	Risiko Legal	Ketidakhadiran Perangkat Daerah teknis terkait dalam hal pencermatan substansi teknis atau pembahasan dengan DPRD Provinsi Tawa Tengah	Kebijakan baru Pemerintah Daerah terkait implementasi Produk Hukum Daerah tertunda	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat
18	Sasaran Program	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	produk hukum daerah yang disusun tumpang tindih dan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya	Risiko Operasional	masih banyak perangkat daerah yang belum memahami pentingnya pengkajian produk hukum melalui analisis dan evaluasi termasuk dalam menindaklanjuti hasil kajian, analsisi dan evaluasi	Banyak produk hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta mengalami permasalahan dalam implementasinya	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Sasaran Program	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Raperda/Raperkada Kab/Kota bertentangan dengan peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi	Risiko Operasional	- Penyampaian draft Raperda/Raperkada belum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan - Permohonan fasilitasi dan/atau evaluasi Raperda/Raperkada yang terlampau banyak	Uraian proses pemberian fasilitasi dan rekomendasi membutuhkan waktu lebih	Pemerintah Daerah kabupaten/kota
20	Sasaran Program	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	Permasalahan / sengketa hukum yang diadukan tidak menemukan solusi	Risiko Reputasi	Tidak terselesaikannya sengketa hukum masyarakat	Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Biro Hukum	Masyarakat pengadu/ teradu
21	Sasaran Program	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Belum terpenuhinya akses masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam proses persidangan	Risiko Kemitraan	Kurangnya jumlah Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi untuk bekerjasama dengan Pemprov Jateng dalam penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak mampu mengikuti proses persidangan	Masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya
22	Sasaran Program	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	Terjadinya fraud karena pengajuan permohonan pencairan biaya bantuan hukum tidak terverifikasi	Risiko Fraud	Tidak terlaksananya verifikasi permohonan pencairan bantuan hukum	Pemberian bantuan hukum tidak tepat sasaran	Masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya
23	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	Kesalahan atau penundaan kegiatan	Risiko Operasional	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran	Pegawai Biro Hukum, PD terkait, masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Hukum	Presentase Fasilitasi HAM Daerah	Kabupaten kota tidak patuh dalam implementasi P5HAM	Risiko Kepatuhan	Tidak optimalnya pembinaan implementasi kabupaten kota peduli HAM	Kurang optimalnya kualitas pelayanan HAM di kabupaten kota	Masyarakat luas
25	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Perundang - Undangan	Presentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang2 an	Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	Risiko Legal	Perangkat Daerah pemrakarsa yang belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan Produk Hukum Penetapan yang sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan baru Pemerintah Daerah terkait implementasi Produk Hukum Daerah tertunda	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat
26	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Hukum	Presentase bantuan hukum yang tertangani	Tidak tersedianya Produk Hukum sebagai alat bukti pada saat terjadi sengketa di Pengadilan	Risiko Legal	Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum menyadari pentingnya pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum khususnya produk hukum untuk kebutuhan pelayanan informasi kepada stakeholder dan masyarakat	Potensi kalahnya Pemerintah Provinsi Jawa tengah dalam proses persidangan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Hukum	Presentase bantuan hukum yang tertangani	Tidak terpenuhinya akses masyarakat dalam pencarian produk hukum	Risiko Legal	Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum menyadari pentingnya pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum khususnya produk hukum untuk kebutuhan pelayanan informasi kepada stakeholder dan masyarakat	Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen hukum yang tidak tersedia	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat
28	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Perundang - Undangan	Presentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji	kabupaten/kota belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan produk hukum daerah sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Risiko Operasional	belum optimalnya pelaksanaan pemantauan/pembinaan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota	Raperda/Raperkada yang diajukan belum secara kualitas memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah	Pemerintah Daerah kabupaten/kota
29	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Perundang - Undangan	Meningkatnya Kualitas Database Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Raperda/Raperkada yang dimohonkan fasilitasi masih banyak terdapat kekurangan baik terkait materi muatan maupun dasar hukum yuridisnya	Risiko Operasional	belum terdapatnya kesepahaman atas penyusunan/pembentukan produk hukum daerah serta permasalahan-permasalahan menyangkut implementasinya	tidak optimalnya implementasi dari Perda/Perkada yang sudah ditetapkan	Pemerintah Daerah kabupaten/kota
30	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Hilangnya dokumen dan arsip di Biro Hukum	Risiko Operasional	Penyimpanan dokumen dan arsip belum baik dan benar	Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Hukum	Pegawai Biro Hukum, PD terkait, masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan	Kerugian keuangan daerah dan dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diterima	Pegawai Biro Hukum, PD terkait, masyarakat
32	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian	Risiko Operasional	Kesalahan dalam pengisian data kepegawaian	Dokumen kepegawaian tidak dapat diproses ke tahapan selanjutnya	Pegawai Biro Hukum, PD terkait
33	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran	Risiko Operasional	Lemahnya pengawasan dan penyimpanan sarana dan prasarana perkantoran	Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Hukum	Pegawai Biro Hukum, PD terkait, masyarakat
34	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan	Risiko Operasional	Tumpang tindihnya disposisi penyusunan laporan antar unit kerja	laporan tidak dapat disusun tepat waktu	PD terkait
Biro Kesejahteraan Rakyat								
35	Sasaran Program	Program Kesejateraan Rakyat	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan	Risiko Fraud	Penerima Hibah tidak memahami peraturan tentang proses penatausahaan hibah	Hibah tidak sesuai dengan peruntukan	Penerima Hibah
36	Sasaran Program	Program Kesejateraan Rakyat	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pendidikan, Sosial & Kesehatan	Risiko Operasional	1. Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang mempedomani target kinerja yg telah ditetapkan pada RKO 2. Kurang optimalnya kontrol masing-masing koordinator dalam memantau pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Sosial tidak tercapai sesuai target yg telah ditetapkan pada RKO	1. Sub Koordinator Sosial (pelaksana) 2. Koordinator Pelayanan Dasar (PPTK) 3. Kepala Biro Kesra (KPA) 4. Sekretaris Daerah (PA)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Sasaran Program	Program Kesejateraan Rakyat	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	Tidak adanya informasi yang didapat terkait kebijakan maupun data yg update serta terintegrasi dengan OPD Ampuan dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Risiko Operasional	1.Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang cermat mempedomani rencana yang telah ditetapkan pada RKO 2. Kurang optimalnya dalam memantau/ mengawasi pelaksanaan kegiatan. 3. Lemahnya koordinasi tugas dan fungsi Biro dengan OPD ampuan sehingga hasil Kebijakan dari Policy Brief belum bisa diimplementasikan oleh OPD ampuan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak tercapai sesuai target yg telah ditetapkan pada RKO	1. 3 Sub Koordinator Bidang Non Pelayanan Dasar (pelaksana) 2. Koordinator Non Pelayanan Dasar selaku (PPTK) 3. Kepala Biro Kesra selaku (KPA) 4. Sekretaris Daerah selaku (PA)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terdapat usulan hibah yang tidak memenuhi standar masuk dalam DPA	Risiko Operasional	1. Sistem yang digunakan untuk inputing hibah belum dapat secara otomatis menolak berkas usulan yang tidak memenuhi standar; 2. Waktu verifikasi yang terbatas 3. Banyaknya usulan kegiatan hibah yang tidak didasari dengan data dukung yang lengkap	Hibah tidak dapat dicairkan	Penerima Hibah
39	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Realisasi hibah pada akhir periode	Risiko Operasional	Keterlambatan pemenuhan kelengkapan administrasi hibah	Laporan realisasi pencairan hibah melebihi ketentuan	Biro Kesra
40	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar bidang Pendidikan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	Risiko Operasional	(1) Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang cermat mempedomani rencana yang telah ditetapkan pada RKO, (2) Kurang optimalnya dalam memantau/ mengawasi pelaksanaan kegiatan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan (RKO)	Sub Koordinator Bidang Pendidikan (pelaksana)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar bidang Kesehatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	Risiko Operasional	(1) Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang cermat mempedomani rencana yang telah ditetapkan pada RKO, (2) Kurang optimalnya dalam memantau/ mengawasi pelaksanaan kegiatan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan (RKO)	Sub Koordinator Bidang Kesehatan (pelaksana)
42	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar bidang Sosial tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	Risiko Operasional	(1) Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang cermat mempedomani rencana yang telah ditetapkan pada RKO, (2) Kurang optimalnya dalam memantau/ mengawasi pelaksanaan kegiatan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Sosial tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan (RKO)	Sub Koordinator Bidang Sosial (pelaksana)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	Risiko Operasional	(1) Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang cermat mempedomani rencana yang telah ditetapkan pada RKO, (2) Kurang optimalnya dalam memantau/ mengawasi pelaksanaan kegiatan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan (RKO)	Sub Koordinator Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan (pelaksana)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	Risiko Operasional	(1) Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang cermat mempedomani rencana yang telah ditetapkan pada RKO, (2) Kurang optimalnya dalam memantau/ mengawasi pelaksanaan kegiatan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan (RKO)	Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (pelaksana)
BIRO BUMD								
45	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Pembagian dividen yang tidak sesuai ketentuan	Risiko Fraud	Adanya intervensi politis dalam proses pembahasan dividen untuk mengarahkan hasil pembagian laba	1. Proses pembahasan menjadi tidak objektif 2. Potensi kerugian daerah	BUMD dan Pemerintah Daerah
46	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	Laporan kinerja tidak valid	Risiko Fraud	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat	BUMD dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	Keterlambatan penyampaian laporan keuangan BUMD	Risiko Operasional	1. Proses audit yang lama 2. Keterlambatan penyusunan laporan keuangan	1. Penundaan pembahasan dividen 2. Berpengaruh pada perencanaan keuangan daerah	BUMD dan Pemerintah Daerah
48	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	Ketidaksepakatan antara BUMD dan Pemda terkait besaran dividen	Risiko Operasional	Perbedaan kepentingan antara BUMD dan Pemda dalam alokasi laba	Proses pembahasan menjadi panjang dan dapat menghambat pencairan dividen	BUMD dan Pemerintah Daerah
49	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	Pemerintah Provinsi mendapatkan dividen yang lebih rendah dari periode sebelumnya	Risiko Operasional	Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)	Berpengaruh terhadap penerimaan PAD	BUMD dan Pemerintah Daerah
50	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Keterlambatan Pengumpulan Laporan	Risiko Operasional	Laporan dari unit-unit di bawah BLUD (misal: poliklinik, instalasi rawat inap) tidak dikirim tepat waktu	Monev tidak dapat dilakukan sesuai jadwal triwulanan	Pemerintah Daerah
51	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD	Risiko Operasional	Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD	Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditola	BUMD dan Pemerintah Daerah
52	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	Risiko Operasional	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi	Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah	BUMD dan Pemerintah Daerah
53	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	Risiko Operasional	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Keuangan	Kinerja BUMD Keuangan tidak bertambah baik	BUMD Keuangan dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Triwulanan BUMD terlambat	Risiko Operasional	1. BUMD tidak mengisi form verifikasi dan evaluasi 2. Kurangnya koordinasi	1. Evaluasi kinerja tidak tepat waktu 2. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan strategis	BUMD dan Pemerintah Daerah
55	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan	Keterlambatan penyusunan RKAP oleh BUMD	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi antara BUMD dan Pemerintah Daerah	1. RKAP tidak dapat disahkan tepat waktu 2. Menghambat operasional BUMD 3. Mengganggu perencanaan keuangan daerah	BUMD dan Pemerintah Daerah
BIRO PEREKONOMIAN								
56	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Hasil keputusan rakor tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi	Risiko Operasional	Instansi memiliki Program Prioritas yang Berbeda	potensi penyimpangan atau kegagalan program tidak terdeteksi dini	Pemerintah Daerah
57	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan masih parsial	Risiko Strategis	Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika regulasi	Rekomendasi kebijakan belum mendorong ketahanan pangan di Jawa Tengah	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah 3. Swasta 4. Petani 5. Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	Data Tidak Akurat atau Tidak Valid	Risiko Strategis	Cakupan Data yang Terbatas	Validitas data adalah fondasi utama keberhasilan monev. Tanpa data yang akurat, keputusan apa pun yang diambil untuk mengendalikan inflasi akan kehilangan pijakannya.	Pemerintah Daerah
59	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2. Sinkronisasi program/kegiatan menjadi kurang efektif	Risiko Operasional	2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas	2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal.	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan serta Masyarakat
60	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase capaian kinerja program bidang	Rekomendasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi Sumber Daya Mineral menjadi parsial	Risiko Operasion	Tidak ada integrasi data Monev antar OPD	Rekomendasi tidak relevan	OPD sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral
61	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rekomendasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian menjadi parsial	Risiko Operasion	Tidak ada integrasi data Monev antar OPD	Rekomendasi tidak relevan	OPD sektor Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Sasaran Program	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase capaian kinerja program bidang	Reputasi geopark menurun	Risiko Kemitraar	Pengembangan geopark tidak menjadi prioritas kegiatan.	rendahnya tingkat kunjungan wisatawan dan perekonomian wilayah sekitar geopark	OPD sektor pariwisata, Badan Pengelola Geopark, Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat wilayah Geopark.
63	Sasaran Program	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pelaku usaha mengalami kendala dalam pengembangan Low Carbon Rice dan Sustainable Food	Risiko Kemitraar	evaluasi atas efektivitas hasil fasilitasi tidak mencakup seluruh objek yang diberikan fasilitas	tidak ada pengembangan low carbon rice dan suistainable food	OPD Ampuan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat
64	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pengolahan dan penyajian data menjadi kurang efektif dan efisien.	Risiko Operasional	1. Keterbatasan sumber data/pengumpulan data	1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat.	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan serta Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3. Gangguan/keterlambatan acara	Risiko Operasional	3. *Human Error* (Kurangnya partisipasi aktif peserta, kurangnya persiapan dan koordinasi tim panitia/peserta)	3. Kehadiran dan partisipasi peserta kurang maksimal/kendala administratif	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan serta Masyarakat
66	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1, Permintaan data/kegiatan prioritas di bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dipenuhi Kab/Kota	Risiko Operasional	1. Kurang/keterbatasan Pemkab/Pemkot atas pemahaman program/kegiatan/isu strategis/rekomendasi kebijakan prioritas	1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat.	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan serta Masyarakat
67	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2. Belum ada sinkronisasi program/kegiatan prioritas daerah	Risiko Operasional	2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas/isu strategis daerah	2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal serta rekomendasi/kebijakan belum dijalankan oleh kab/Kota	
68	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Gangguan/keterlambatan acara	Risiko Operasional	1. *Human Error* (Kurangnya partisipasi aktif peserta, kurangnya persiapan dan koordinasi)	1. Kehadiran dan partisipasi peserta kurang maksimal/kendala administratif	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2. Gangguan sistem/logistik/jaringan	Risiko Operasional	2. Kesalahan logistic/sistem/jaringan	2. Rapat terganggu/terlambat	Industri dan Perdagangan serta Masyarakat
70	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pengolahan dan penyajian data menjadi kurang efektif dan efisien.	Risiko Operasional	1. Keterbatasan sumber data/pengumpulan data	1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat.	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Investor, Pelaku Usaha, Pelaku Investasi, pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masyarakat
71	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal,	2. Sinkronisasi program/kegiatan menjadi kurang efektif	Risiko Operasional	2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas	2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal.	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Investor, Pelaku Usaha,
72	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4. Gangguan sistem/logistik/jaringan	Risiko Operasional	4. Kesalahan logistic/sistem/jaringan	4. Acara Rakor terganggu/terlambat	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Investor, Pelaku Usaha, Pelaku Investasi, pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1, Permintaan data/kegiatan prioritas di bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dipenuhi Kab/Kota	Risiko Operasional	1. Kurang/keterbatasan Pemkab/Pemkot atas pemahaman program/kegiatan/isu strategis/rekomendasi kebijakan prioritas	1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat.	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Investor, Pelaku Usaha, Pelaku Investasi, pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masyarakat
74	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2. Belum ada sinkronisasi program/kegiatan prioritas daerah	Risiko Operasional	2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas/isu strategis daerah	2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal serta rekomendasi/kebijakan belum dijalankan oleh kab/Kota	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Investor, Pelaku Usaha, Pelaku Investasi, pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masyarakat
75	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Gangguan/keterlambatan acara	Risiko Operasional	1. *Human Error* (Kurangnya partisipasi aktif peserta, kurangnya persiapan dan koordinasi)	1. Kehadiran dan partisipasi peserta kurang maksimal/kendala administratif	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Investor, Pelaku Usaha, Pelaku Investasi, pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masyarakat
76	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Gangguan sistem/logistik/jaringan	Risiko Operasional	2. Kesalahan logistic/sistem/jaringan	2. Rapat terganggu/terlambat	

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Penurunan fungsi DAS di Jawa Tengah	Risiko Operasion	Kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) menurun	Kerugian ekonomi masyarakat dan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor	OPD ampuan, stakeholder/mitra kerja terkait dan masyarakat
78	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Munculnya pola pengelolaan mangrove yang terpaku pada satu sektor	Risiko Operasion	Pengelolaan mangrove terpisah-pisah	Ekosistem mangrove tidak dapat hidup dengan optimal	OPD ampuan, stakeholder/mitra kerja terkait dan masyarakat
79	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral	Pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan rencana/target	Risiko Operasion	Menurunnya potensi manajemen energi pada sektor pemanfaatan energi	Output dari kegiatan manajemen energi tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Pemerintah Kabupaten Kota
80	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	data kebutuhan pupuk bersubsidi tidak sesuai	Risiko Operasion	Penyaluran pupuk bersubsidi terhambat	pupuk tidak tersalurkan secara merata dan tepat sasaran	• Pemerintah Pusat, provinsi, kab/kota, PT.PI • Petani, LMDH, Pembudidaya ikan
81	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Rendahnya kualitas garam rakyat dan penurunan produktivitas dan hasil panen	Risiko Operasion	Produksi garam dan hasil budidaya perikanan darat/tambak mengalami penurunan	- Garam rakyat tidak terserap oleh Industri secara maksimal - Kerugian finansial bagi pembudidaya	OPD Ampuan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat
82	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tidak sesuainya kuota/alokasi BBM subsidi untuk nelayan	Risiko Operasion	Masih banyak kapal perikanan yang belum terdata	Nelayan kesulitan mendapatkan BBM pada saat akan melaut	OPD Ampuan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan	Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal	Risiko Operasion	Adanya lahan produktif yang tidak digunakan masyarakat untuk budidaya bahan baku pangan lokal	1. Bahan Baku pangan local sangat terbatas 2. Kesulitan mendapatkan pelaku usaha pangan lokal	OPD Ampuan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat
84	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan	Rendahnya penerapan fortifikasi beras	Risiko Operasion	Perencanaan berbasis data yang lemah	Fortifikasi bisa berjalan tanpa sasaran yang tepat (miskin data) dan tidak efektif menyasar kelompok membutuhkan	OPD Ampuan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat
85	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Kesenjangan penyebaran informasi dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait DBHCHT	Risiko Operasion	Keterbatasan data yang dimiliki Kab/Kota	tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan memberikan rekomendasi/solusi	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Provinsi/Kab./ Kota
86	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Hilangnya dokumen dan arsip di Biro Infrastruktur dan SDA	Risiko Operasional	Penyimpanan dokumen dan arsip belum baik dan benar	Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Infrastruktur dan SDA	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, OPD ampuan, K/L, stakeholder terkait, Masyarakat
87	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan	Kerugian keuangan daerah dan dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diterima	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, OPD ampuan, K/L, stakeholder terkait, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian	Risiko Operasional	Kesalahan dalam pengisian data kepegawaian	Dokumen kepegawaian tidak dapat diproses ke tahapan selanjutnya	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA
89	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran	Risiko Operasional	Lemahnya pengawasan dan penyimpanan sarana dan prasarana perkantoran	Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Hukum	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, Biro Umum
90	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan	Risiko Operasional	Tumpang tindihnya disposisi penyusunan laporan antar unit kerja	laporan tidak dapat disusun tepat waktu	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, OPD ampuan, K/L, stakeholder terkait, Masyarakat
91	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal	Risiko Operasion	Adanya lahan produktif yang tidak digunakan masyarakat untuk budidaya bahan baku pangan lokal	1. Bahan Baku pangan local sangat terbatas 2. Kesulitan mendapatkan pelaku usaha pangan lokal	OPD Ampuan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat
92	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Rendahnya penerapan fortifikasi beras	Risiko Operasion	Perencanaan berbasis data yang lemah	Fortifikasi bisa berjalan tanpa sasaran yang tepat (miskin data) dan tidak efektif menyasar kelompok membutuhkan	OPD Ampuan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Kesenjangan penyebaran informasi dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait DBHCHT	Risiko Operasion	Keterbatasan data yang dimiliki Kab/Kota	tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan memberikan rekomendasi/solusi	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Provinsi/Kab./ Kota
94	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Hilangnya dokumen dan arsip di Biro Infrastruktur dan SDA	Risiko Operasional	Penyimpanan dokumen dan arsip belum baik dan benar	Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Infrastruktur dan SDA	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, OPD ampuan, K/L, stakeholder terkait, Masyarakat
95	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan	Kerugian keuangan daerah dan dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diterima	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, OPD ampuan, K/L, stakeholder terkait, Masyarakat
96	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian	Risiko Operasional	Kesalahan dalam pengisian data kepegawaian	Dokumen kepegawaian tidak dapat diproses ke tahapan selanjutnya	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA
97	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran	Risiko Operasional	Lemahnya pengawasan dan penyimpanan sarana dan prasarana perkantoran	Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Hukum	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, Biro Umum

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan	Risiko Operasional	Tumpang tindihnya disposisi penyusunan laporan antar unit kerja	laporan tidak dapat disusun tepat waktu	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, OPD ampuan, K/L, stakeholder terkait, Masyarakat
Biro Bangda								
99	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah atau program strategis tidak tercapai	Risiko Operasional	1. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD kurang mendukung dalam upaya pencapaian indikator kinerja 2. Kebijakan yang tidak tepat sasaran atau adanya kebijakan yang tumpang tindih antar OPD	Penilaan kinerja pemerintah daerah turun	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
100	Sasaran Program	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	Terdapat masalah teknis pada sistem aplikasi penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dan anggaran yang akan di simulasikan	Risiko Operasional	Sistem aplikasi belum siap digunakan untuk kegiatan simulasi	Materi yang di sosialisasikan/ didiseminasikan tidak dapat terinformasi secara utuh atau optimal	SKPD Provinsi
101	Sasaran Program	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi bantuan keuangan	Kendala operasional dalam proses *updating* data pelaksanaan Bankeu secara manual	Risiko Operasional	Belum terfasilitasinya seluruh OPD pengelola kegiatan Bantuan Keuangan pada 35 Kabupaten/Kota	Terhambatnya penyajian data pelaksanaan kegiatan secara lengkap dan mendalam.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	Sasaran Program	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	Data kinerja pada *e-controlling* kinerja tidak valid	Risiko Operasional	SKPD belum melengkapi data Kinerja pada Aplikasi *e-Controlling* Kinerja	Data tidak dapat digunakan dalam analisis pengambilan kebijakan	Jawa Tengah
103	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	Ketidakselarasan antar indikator pada dokumen perencanaan pada biro - biro lingkup Setda	Risiko Operasional	Kurang koordinasi antara pengampu perencanaan dengan pelaksana program dan kegiatab pada biro-biro lingkup Setda	Kualitas perencanaan Setda kurang baik	Biro-biro lingkup Setda
104	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	informasi yang disajikan tidak relevan	Risiko Reputasi	materi publikasi yang disajikan tidak sesuai dengan standar publikasi media pemerintahan	terjadi misinformasi terhadap masyarakat yang menggunakan layanan media informasi	Pengguna Media / Masyarakat
105	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Data penyusunan RKO perangkat daerah tidak lengkap	Risiko Operasional	Tata cara penyusunan RKO belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana di SKPD	Waktu pelaksanaan desk menjadi lebih lama/tidak optimal	SKPD Provinsi
106	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Data penyusunan RK (APBN) perangkat daerah belum sesuai/tidak lengkap	Risiko Operasional	Pagu APBN (Dekon TP) sering terjadi penyesuaian/perubahan menyesuaikan kebijakan Pusat	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Pengelola Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
107	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Data RKO (APBD) perangkat daerah tidak selesai tepat waktu	Risiko Operasional	Perangkat daerah kurang melakukan koordinasi internal	RKO (APBD) sebagai bahan pengendalian menjadi tidak valid	Biro Administrasi Pembangunan Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Pelaksana kegiatan PSN tidak melaporkan progres dan hasil kegiatan secara periodik	Risiko Operasional	Pelaksana PSN di Jawa Tengah belum memahami pentingnya memberikan laporan progres dan hasil kegiatan secara periodik, kepada Pemprov Jawa Tengah.	Kesulitan dalam menyusun laporan progres pelaksanaan PSN kepada Gubernur	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
109	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Target keuangan dan fisik RKO berubah	Risiko Operasional	Perubahan jadwal / pergeseran kegiatan dan anggaran tidak diinformasikan	Penatausahaan ikut berubah (RAK dan SPD), pengendalian kegiatan dan anggaran berpotensi tidak tepat	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
110	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Informasi paket pekerjaan yang dilaksanakan tidak lengkap dan valid	Risiko Operasional	Pelaksanaan monitoring tidak didampingi oleh personil yang membidangi dan/atau tidak disertai data dukung yang dibutuhkan	Proses monitoring menjadi tidak efektif, efisien dan optimal	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
111	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	Adanya pergantian admin penyusun RKO pada OPD Kab/Kota.	Pekerjaan tidak selesai dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan	1. Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Penyedia.
112	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	Adanya kepala daerah baru atau anggota dewan baru	Pekerjaan tidak selesai dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan	1. Pemerintah Provinsi; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota.

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Keterlambatan pengiriman laporan bulanan melalui aplikasi	Risiko Operasional	Kurangnya tingkat partisipasi pengiriman laporan oleh OPD Kab/Kota	Tidak tersedianya data valid yang mencakup seluruh kegiatan sesuai progres di lapangan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
114	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Data yang dilaporkan berbeda dengan kondisi riil di lapangan	Risiko Operasional	Pelaksanaan monitoring hanya dapat berupa sampling	Hasil data untuk analisis kebijakan menjadi tidak maksimal	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
115	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Proses verifikasi capaian *progress* pelaksanaan kegiatan Bankeu terhambat	Risiko Operasional	Bagian Pembangunan Kab/Kota yang hadir dalam Rakor tidak dapat memberikan informasi kendala permasalahan dan *progress real time* di lapangan	Terhambatnya penyajian data pelaksanaan kegiatan secara lengkap dan mendalam	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
116	Sasaran Kegiatan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Data kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kaidah pelaporan	Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan user pelaporan e-controlling APBD	Laporan tidak bisa ditindaklanjuti sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
117	Sasaran Kegiatan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid	Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan	Analisis pengambilan keputusan/kebijakan menjadi tidak tepat	Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	Sasaran Kegiatan	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penyajian laporan hasil evaluasi kinerja beberapa Biro lingkup Setda belum sesuai ketentuan	Risiko Operasional	Terdapat perbedaan persepsi pada pengampu evaluasi masing-masing Biro	Laporan hasil evaluasi tidak dapat digunakan secara optimal sebagai bahan perbaikan kinerja periode berikutnya	Biro-biro lingkup Setda
119	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Data kepegawaian tidak valid	Risiko Operasional	Pegawai tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala	Terdapat kelebihan pembayaran pada gaji (tunjangan keluarga)	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
120	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Berkas keuangan tidak lengkap sesuai dengan prosedur	Risiko Operasional	Perubahan sistem informasi perpajakan terkait pembuatan billing dan pelaporan bukti potong pajak	Proses revolving uang persediaan terhambat	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
121	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Kerusakan arsip	Risiko Operasional	Kurang memadainya sarana penyimpanan arsip fisik	Hilangnya informasi penting dan terganggunya administrasi	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
122	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Ketidaksesuaian pencatatan aset dengan kondisi fisik	Risiko Operasional	Perpindahan barang yang tidak sesuai prosedur dan pengelolaan yang belum efektif	Hilangnya aset	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
123	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Hilangnya dan atau rusaknya aset	Risiko Fraud	Ketidaksesuaian pencatatan dan pendokumentasian aset dengan kondisi fisik	aset daerah yang pencatatannya tidak sesuai, dapat digunakan untuk kepentingan pribadi	Biro Administrasi Pembangunan Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan	Risiko Reputasi	Tidak tersampaikannya dokumen surat pada bagian administrasi persuratan	Reputasi Biro Bangda menjadi kurang baik	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
125	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Spesifikasi barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam kontrak	Risiko Kemitraan	Proses pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan rencana pengadaan	Kualitas barang jasa yang tidak sesuai dapat mengurangi efektifitas kinerja	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
BIRO APBJ								
126	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa	Risiko Strategis	Kurangnya pemahaman mengenai metode pemilihan pengadaan barang/jasa	Capaian ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) belum maksimal	OPD Provinsi Jawa Tengah
127	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	1. Perencanaan pengadaan tidak matang 2. Data RUP tidak valid	Risiko Strategis	- Pemahaman PA/KPA/PPK OPD yang belum seragam dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa - PA/KPA/PPK Kurang cermat dalam menetapkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)	- Menghambat pelaksanaan pengadaan barang jasa - berpotensi aduan	- Pemprov Jateng - Pelaku Usaha - Masyarakat
128	Sasaran Program	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	Penayangan etalase usulan OPD terlambat	Risiko Kemitraan	Dokumen Teknis yang diusulkan oleh OPD masih kurang detail	Menghambat pelaksanaan kegiatan	OPD Pengusul

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	Sasaran Program	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Pemecahan paket pengadaan	Risiko Fraud	adanya pengondisian pengadaan untuk menghindari tender	Potensi Kerugian Negara	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
130	Sasaran Program	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	Pemenuhan dokumen MCP terlambat	Risiko Kepatuhan	Tidak ada userguide dari KPK	Nilai MCP KPK pada area PBJ turun	Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah
131	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Arsip tersebar di berbagai tempat	Risiko Operasional	kurang sarana penyimpanan arsip fisik	arsip rusak dan hilang	OPD BIRO APBJ
132	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	pencatatan aset tidak sesuai kondisi fisik aset	Risiko Operasional	perpindahan barang yang tidak sesuai prosedur, pengelolaan yang belum efektif, penggunaan aset tidak sesuai ketentuan dan adanya aset yang tidak tercatat	hilangnya aset	OPD BIRO APBJ
133	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Data kepegawaian tidak valid	Risiko Operasional	pegawai tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala	terdapat kelebihan pembayaran pada gaji (tunjangan keluarga)	Pegawai di Biro APBJ
134	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Pembayaran Gaji Berkala terlambat	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi antar biro (terlambat mengusulkan)	Pegawai complain/Aduan pegawai	Pegawai di Biro APBJ

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen perencanaan/evaluasi terlambat disusun	Risiko Operasional	Pengisian pada sistem (e-plan/e-cont) mendekati tenggat waktu	1. Pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda 2. Analisis pengambilan keputusan menjadi terhambat	OPD BIRO APBJ
136	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan	Risiko Operasional	Informasi terlewat	Reputasi Biro APBJ menjadi kurang baik	OPD BIRO APBJ
137	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	publikasi konten tidak sesuai dengan jadwal	Risiko Operasional	keterlambatan kontributor dalam pengiriman materi publikasi	Informasi yang dipublikasi tidak up to date	OPD BIRO APBJ
138	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Spesifikasi barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam kontrak	Risiko Fraud	Adanya gratifikasi dari penyedia ke pejabat pengadaan	Barang jasa tidak dapat digunakan secara optimal	OPD BIRO APBJ
139	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Pembayaran invoice tertunda	Risiko Kemitraan	Penyedia mengirimkan invoice melebihi batas waktu yang ditentukan	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan RKO	Penyedia Barang/Jasa
140	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Data Survey tidak valid	Risiko Operasional	Responden tidak jujur dalam mengisi kuesioner	Indeks Kepuasan Masyarakat tidak dapat dipertanggungjawabkan	OPD BIRO APBJ
141	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak dapat membuat billing dan pelaporan bukti potong pajak	Risiko Operasional	Perubahan sistem informasi perpajakan	pembayaran pajak tidak sesuai dengan bulan pemotongan pajak	OPD BIRO APBJ

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Terdapat peserta Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PBJ yang tidak hadir	Risiko Operasional	Tidak tersampaikannya informasi terkait Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PBJ	Informasi tentang pengetahuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak tersampaikan dengan optimal	OPD Provinsi Jawa Tengah
143	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Pengadaan barang/jasa dengan spesifikasi dan kebutuhan yang sama tidak dilakukan secara konsolidasi	Risiko Operasional	keterbatasan pemahaman Konsolidasi di tingkat OPD	Masih ditemukan potensi kemahalan harga pada barang/jasa dengan spesifikasi yang sama	K/L/PD Khusunya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
144	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif	Sanggah / Sanggah Banding / Aduan	Risiko Kemitraan	Peserta pemilihan merasa dirugikan	Waktu pelaksanaan pekerjaan dan outputnya tertunda	OPD Provinsi Jawa Tengah
145	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif	Penyampaian usulan SHS yang double	Risiko Operasional	-OPD belum sepenuhnya mencermati data standar harga dalam sistem e-SHS	Perbedaan harga pada sistem SHS	OPD Provinsi Jawa Tengah
146	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Gangguan teknis pada sistem	Risiko Operasional	Tidak semua wilayah atau OPD memiliki akses yang setara terhadap teknologi atau infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengoperasian sistem secara optimal.	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
147	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Overload pada jaringan	Risiko Operasional	Banyaknya pengguna yang mengakses internet di satu jaringan.	Penurunan kecepatan akses dan ketidakstabilan koneksi.	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Pelaku Usaha terkendala mendaftar SPSE.	Risiko Operasional	Kendala pendaftaran akun SPSE: - Pelaku Usaha sudah pernah mendaftarakan usahanya di LPSE lain namun belum pernah login ke LPSE Provinsi Jawa Tengah, sehingga LPSE Jawa Tengah tidak bisa melihat record datanya. - Pelaku Usaha salah memilih lokasi verifikasi akun SPSE - Pelaku Usaha tidak melanjutkan proses verifikasi dalam jangka waktu lama, sehingga lupa user ID dan password yang didaftarkan.	Mengakibatkan duplikasi akun perusahaan, sehingga berdampak pada permasalahan manajemen data SiKAP.	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
149	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Pelaku Pengadaan terkendala dalam proses pendaftaran Katalog Elektronik V6 (akun inaproc).	Risiko Operasional	Kendala pendaftaran akun Inaproc: - Pelaku Pengadaan gagal verifikasi Profil - Pelaku Pengadaan gagal verifikasi Manajemen Akses - Pelaku Usaha gagal verifikasi Privy - PPK terkendala TTE	Terkendalanya proses pendaftaran akun Inaproc dan proses pengadaan tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
150	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Proses Pengadaan Tertunda	Risiko Operasional	Perbedaan waktu penyelesaian permasalahan dan menunggu penanganan dari pihak terkait.	Target pengadaan tidak tercapai	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Koneksi internet yang tidak stabil.	Risiko Operasional	- Gangguan server atau infrastruktur jaringan	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
152	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Realisasi PBJ OPD tidak terbaca	Risiko Operasional	Data tidak diisi secara lengkap.	Capaian realisasi PBJ OPD rendah	Pelaku PBJ dan OPD
153	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Terhambatnya proses PBJ yang masuk dalam Proyek Strategis Daerah	Risiko Operasional	Efisiensi anggaran	Pembangunan tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	OPD Pengampu Proyek Strategis Daerah
154	Sasaran Kegiatan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Terdapat aduan dari masyarakat terkait pelayanan pengadaan barang/jasa kepada APH	Risiko Kepatuhan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pengaduan pengadaan barang/jasa	Adanya permintaan pemberian keterangan dari APH kepada Pegawai Biro APBJ	SDM Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah
155	Sasaran Kegiatan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Materi tidak tersampaikan kepada pegawai Biro APBJ secara menyeluruh	Risiko Kepatuhan	Tidak semua pegawai hadir saat pelaksanaan sosialisasi	- Informasi mengenai kebijakan pengendalian gratifikasi, aduan internal, benturan kepentingan, alur/SOP tidak tersampaikan dengan baik	SDM Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaku Usaha terkendala mendaftar marketplace dalam Blangkon Jateng.	Risiko Operasional	Kendala pendaftaran akun marketplace dalam Blangkon Jateng: - Tidak semua Pelaku Usaha khususnya UMKK dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik.	Terkendalanya proses pendaftaran dan proses pengadaan tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
157	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Koneksi internet peserta tidak stabil	Risiko Operasional	Untuk pelatihan online, banyak pengguna mungkin tidak memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai untuk mengikuti pelatihan secara virtual.	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
158	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Integrasi Antar Sistem mengalami kendala	Risiko Operasional	Beberapa sistem tidak menyediakan API (Application Programming Interface) yang memadai	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
159	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Resistensi/penolakan penggunaan sistem baru	Risiko Kepatuhan	Pengguna yang sudah terbiasa dengan cara manual atau sistem lama yang mereka anggap lebih mudah dan sudah terbiasa	Menghambat kelancaran pelaksanaan pengadaan	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	-Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indikator Kematangan UKPBJ) Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan target -Terhambatnya capaian UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi level 3 (proaktif)	Risiko Kepatuhan	Banyaknya bukti dukung yang harus dipenuhi sedangkan personil yang dimiliki terbatas	-Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) kurang maksimal -UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai tingkat kematangan level 3 (proaktif)	UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah
161	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Pengoperasian sistem aplikasi terkendala	Risiko Operasional	Terdapat beragam tingkat pemahaman dan keahlian pengguna yang dilatih, mulai dari yang sangat berpengalaman hingga yang minim pengetahuan tentang teknologi.	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
162	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Resistensi/penolakan penggunaan sistem baru	Risiko Kepatuhan	Beberapa pengguna merasa tidak nyaman atau ragu untuk beradaptasi dengan sistem baru, meskipun pelatihan sudah dilakukan.	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
163	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Keterbatasan dalam penyusunan standardisasi LPSE di masing-masing UKPBJ.	Risiko Operasional	Tingkat kesiapan infrastruktur teknologi yang berbeda	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Sistem yang dikembangkan belum dapat memfasilitasi kebutuhan masing-masing UKPBJ secara spesifik.	Risiko Operasional	Setiap daerah atau kabupaten/kota memiliki regulasi dan kebijakan daerah yang mungkin berbeda dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ dan SKPD pada kabupaten/kota
165	Sasaran Kegiatan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Tidak semua SDM PBJ mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas SDM PBJ	Risiko Operasional	Kesibukan pekerjaan yang padat pada PA/KPA yang merangkap sebagai PPKom	Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan PBJ kurang maksimal	OPD
166	Sasaran Kegiatan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ) tidak sesuai dengan target	Risiko Kepatuhan	Minimnya minat perpindahan dari Jabatan Lain ke JF PPBJ, karena resiko lebih besar daripada kesejahteraan yang didapat	Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) kurang maksimal	Provinsi Jateng
167	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Terhambatnya capaian UKPBJ Provinsi Jawa Tengah menjadi PKPBJ	Risiko Kepatuhan	Kekurangan/revisi pemenuhan bukti dukung oleh UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang belum mencapai tingkat kematangan level 3 (proaktif) belum semua di appove oleh LKPP	UKPBJ Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai tingkat kematangan level 4 (strategis)	Biro APBJ

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Tidak terpenuhinya target peserta Rakor UKPBJ	Risiko Operasional	Waktu penyampaian undangan kepada UKPBJ Kab/Kota terlalu singkat	Informasi tentang pembahasan permasalahan beserta solusi pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak maksimal tersampaikan kepada target peserta	Biro APBJ dan UKPBJ Kab/kota
169	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Ketidaksesuaian antara sistem pengadaan elektronik dengan standar atau kebijakan yang ada di masing-masing OPD	Risiko Operasional	Pengadaan barang dan jasa di berbagai OPD memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dan spesifik, yang mungkin tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh satu sistem pengadaan elektronik yang standar.	Kebingungan pengguna dalam mengimplementasikan sistem.	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
170	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Sistem yang dikembangkan belum dapat memfasilitasi kebutuhan masing-masing UKPBJ secara spesifik.	Risiko Operasional	Setiap daerah atau kabupaten/kota memiliki regulasi dan kebijakan daerah yang mungkin berbeda dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ dan SKPD pada kabupaten/kota
171	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Perbedaan pemahaman informasi	Risiko Operasional	Tingkat literasi yang berbeda	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
Biro Organisasi								

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Konsep kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	Risiko Strategis	Perubahan regulasi belum tersosialisasi	Pemberian TPP tidak tepat sasaran	Tim TPP, Seluruh OPD
173	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	Risiko Strategis	Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat	Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan	Pemerintah Kab/Kota
174	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Proses pembangunan ZI tidak berjalan	Risiko Strategis	Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI	Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik	OPD, Masyarakat, Pemprov (Pemilik Risiko: Biro Organisasi)
175	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan	Risiko Kepatuhan	RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh	Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan	OPD, Pemprov, Masyarakat
176	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	Kab/Kota tidak melaksanakan RB secara substansial	Risiko Kepatuhan	Rendahnya minat Kab/Kota terhadap perubahan RB Tematik/General	Kualitas birokrasi Kab/Kota tidak meningkat, ketimpangan pelayanan	Pemkab/Kota, Masyarakat, Pemprov
177	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan	Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah	Risiko Fraud	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial perangkat daerah	Biro Organisasi
178	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Konflik dengan pihak lain	Risiko Legal	Terdapat aset daerah yang masih dikuasai pihak lain	Operasional aktivitas dapat terganggu	Biro Organisasi

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Layanan kepegawaian terlambat atau tidak tepat	Risiko Kemitraan	Tidak ada integrasi sistem dan keterlambatan koordinasi dengan BKD/BKN	Hak ASN terganggu (kenaikan pangkat/gaji), turunnya motivasi kerja	ASN Setda, Pemprov (Pemilik Risiko: Bagian Umum/Kepegawaian)
180	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur	Risiko Operasional	Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami	Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya	OPD, ASN
181	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Jam Kerja tidak dipatuhi	Risiko Kepatuhan	ASN tidak disiplin masuk kerja dan pulang lebih awal	Produktivitas rendah, pelayanan terganggu	OPD, ASN, Masyarakat
182	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Jumlah UPT yang memperoleh nilai IPP Mandiri A - (Sangat Baik) dan A (Prima) dibagi jumlah UPT dikali 100 %	Pelayanan dan pelaksanaan tugas tidak seragam	Risiko Strategis	SOP tidak disusun secara lengkap dan sesuai	Kinerja organisasi tidak terstandarisasi	OPD, ASN
183	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Jumlah UPT yang memperoleh nilai IPP Mandiri A - (Sangat Baik) dan A (Prima) dibagi jumlah UPT dikali 100 %	SP tidak diterapkan di UPP	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman dan komitmen terhadap standar	Masyarakat tidak mendapat pelayanan yang pasti	OPD/UPT/Cabdin/Satuan Pendidikan
184	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Peta proses bisnis tidak digunakan sebagai acuan	Risiko Operasional	Tidak ada tindak lanjut atas hasil fasilitasi	Kegiatan tidak efektif dan tumpang tindih tugas	OPD, Kab/Kota
185	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi	Risiko Kepatuhan	Kebutuhan dan urgensi UPTD tidak diidentifikasi	Pelayanan publik terganggu	Pemerintah Kab/Kota
186	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	Penilaian tingkat kematangan organisasi tidak dilakukan	Risiko Reputasi	Data dukung tidak lengkap atau tidak valid	Kualitas kelembagaan tidak terukur	Pemerintah Kab/Kota

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan	Evaluasi jabatan tidak dilakukan	Risiko Operasional	Kesulitan penyusunan data dukung	Penetapan kelas jabatan tidak valid	OPD, Kab/Kota
188	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan	Pendampingan dan pelaksanaan analisis jabatan tidak dilakukan	Risiko Operasional	OPD tidak responsif	Penataan jabatan tidak sesuai kebutuhan	OPD, Kab/Kota, Pemprov
189	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Informasi jabatan tidak tersusun	Risiko Operasional	Pemahaman OPD tidak merata	Pengelolaan manajemen ASN tidak akurat	OPD, Kab/Kota
190	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen ABK tidak tersusun	Risiko Operasional	Data beban kerja tidak tersedia	Perhitungan kebutuhan pegawai tidak valid	OPD, Kab/Kota
191	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi antar OPD	Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi	OPD, Kab/Kota
192	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen tidak tersusun sesuai pedoman atau tidak dimanfaatkan	Risiko Operasional	Tidak adanya pemahaman teknis penyusunan oleh OPD	Akuntabilitas kinerja rendah, capaian SAKIP tidak meningkat	OPD, Pemprov
193	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Pegawai mengikuti pelatihan yang tidak relevan	Risiko Operasional	Tidak ada perencanaan pengembangan SDM berbasis kebutuhan riil	Kompetensi ASN tidak meningkat, kinerja individu tidak optimal	ASN Setda, Pemprov
194	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	TND tidak dilaksanakan secara seragam	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi TND	Administrasi pemerintahan tidak tertib	OPD, Kab/Kota (Pemilik Risiko: Biro Organisasi)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	ASN tidak mematuhi ketentuan pakaian dinas	Risiko Kepatuhan	Kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran	Citra ASN dan wibawa instansi menurun	OPD, ASN (Pemilik Risiko: Biro Organisasi)
196	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Data evaluasi tidak lengkap atau salah input	Risiko Operasional	Kurangnya SDM memahami instrumen evaluasi	Nilai SPBE rendah, tidak mencerminkan kondisi riil	OPD, Pemprov
197	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Penilaian tidak mencerminkan kinerja pelayanan	Risiko Operasional	Tidak ada data dukung atau tidak valid	Upaya perbaikan tidak tepat sasaran	OPD/UPT, Pemprov
198	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Data SKM tidak mencerminkan persepsi publik	Risiko Operasional	Pengisian survei tidak dilakukan atau tidak objektif	Perbaikan layanan tidak akurat	OPD, UPP, Masyarakat
199	Sasaran Program	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Penilaian kepatuhan rendah	Risiko Reputasi	Tidak tersedia dokumen pendukung atau sarpras	Citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun	OPD, ORI, Masyarakat
200	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Penilaian kepatuhan rendah	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pembaruan atau tindak lanjut atas inovasi	Mutu layanan tidak berkembang	OPD, Pemprov, Masyarakat
201	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Penilaian kepatuhan rendah	Risiko Operasional	Proposal tidak memenuhi standar penilaian pusat	Jawa Tengah tidak terlihat sebagai wilayah inovatif	UPP, Pemprov
202	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan	Risiko Operasional	Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov	Disparitas kualitas pelayanan antar daerah	Kab/Kota, Masyarakat, Pemprov

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Perubahan jadwal perencanaan dan evaluasi	Risiko Operasional	Perubahan regulasi	Dokumen perencanaan dan evaluasi tidak selesai tepat waktu	Biro Organisasi
204	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Terdapat salah input anggaran dalam sistem	Risiko Operasional	Ketidakcermatan pegawai	Penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	Biro Organisasi
205	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Rencana kerja yang disusun tidak sesuai regulasi yang berlaku	Risiko Kepatuhan	Pegawai tidak memperbarui dan/atau memahami regulasi terbaru	Potensi temuan saat pengawasan	Biro Organisasi
206	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Capaian kinerja tidak berdasarkan data yang andal	Risiko Operasional	Tidak ada rekapitulasi data hasil rekomendasi yang dibuat	Kinerja menjadi tidak jelas	Biro Organisasi
207	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Terdapat barang milik daerah yang tidak terdata	Risiko Operasional	Kurangnya pencatatan dan pengawasan barang	Kehilangan barang	Biro Organisasi
208	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Tamu tidak terfasilitasi dengan layak	Risiko Operasional	Ketidaktersediaan bahan logistik	Penurunan reputasi perangkat daerah	Biro Organisasi
209	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Barang milik daerah mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Tidak adanya jadwal pemeliharaan yang terstruktur untuk seluruh BMD	Anggaran meningkat akibat biaya perbaikan mendadak	Biro Organisasi
210	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Barang menjadi tidak dapat digunakan	Risiko Operasional	Pemeliharaan hanya dilakukan ketika barang sudah rusak berat	Efektivitas kerja perangkat daerah menurun	Biro Organisasi

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Barang digunakan tanpa izin untuk keperluan di luar instansi	Risiko Fraud	Penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial dan penyalahgunaan aset daerah	Biro Organisasi
212	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki	Risiko Fraud	Pemalsuan laporan pemeliharaan barang	Kerugian keuangan	Biro Organisasi
Biro Umum								
213	Sasaran Program	Prgram Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Kesalahan penyusunan sambutan, keynote speech, dan makalah pimpinan.	Risiko Reputasi	Adanya kesalahan sumber data yang diperoleh.	Menurunkan reputasi pimpinan	Kepala Biro Umum
214	Sasaran Program	Prgram Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	Terjadinya kerusakan BMD	Risiko Operasional	Kelalaian pengguna BMD	Menghambat kegiatan operasional	Kepala Biro Umum
215	Sasaran Program	Prgram Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	Editing narasi berita pimda terhambat	Risiko Kemitraan	Kurangnya pemenuhan data dari OPD teknis	Sebagian kegiatan/ statement pimpinan tidak jadi tayang di media	Kepala Biro Umum

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	Sasaran Program	Prgram Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Tidak dapat memenuhi kebutuhan pimpinan yang mendadak	Risiko Operasional	Agenda Pimpinan yang Dinamis yang memerlukan kebutuhan yang mendadak	Terdapat keluhan dari pimpinan	Kepala Biro Umum
217	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol	Perolehan materi dan bahan publikasi terbatas	Risiko Operasional	Beberapa lokasi peliputan memerlukan perizinan khusus	Tidak dapat menyajikan publikasi pada lokasi tersebut	Ketua Pokja Liputan dan Dokumentasi
218	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol	Produksi Konten media sosial PPID terlambat	Risiko Operasional	PIC PPID tidak mengirimkan data dan informasi untuk bahan konten media sosial PPID	Penyebaran data dan informasi melalui media sosial tidak berjalan dengan baik	Ketua Pokja Liputan dan Dokumentasi
219	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	Adanya keterlambatan dalam penyampaian bahan bacaan ke pimpinan	Risiko Operasional	Pengiriman bahan bacaan dari penyedia terlambat	Pimpinan tidak mendapatkan informasi terkini via media cetak	Ketua Pokja Publikasi dan Hubungan Media
220	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Teknis pelaksaaan acara berubah	Risiko Operasional	Dinamika atau perubahan kegiatan Pimpinan yang tinggi	Fasilitasi keprotokolan dan Acara yang dihadiri Pimpinan Daerah dapat berjalan tidak sesuai dengan rencana awal	Kepala Sub Bagian Protokol

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Tidak dapat memfasilitasi permohonan pengawalan yang diajukan	Risiko Operasional	Terbatasnya Ketersediaan Petugas Pengawalan pada saat event besar/tertentu	Adanya komplain dari instansi pemohon dikarenakan permintaan tidak dapat dipenuhi, atau dapat dipenuhi namun tidak sesuai.	Kepala Sub Bagian Protokol
222	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	Risiko Kemitraan	Tingginya intensitas pelayanan terhadap kegiatan pimpinan	Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi keprotokolan Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Sub Bagian Protokol
223	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Keterlambatan Pengadaan Pakaian	Risiko Operasional	Harga standarisasi untuk pengadaan dibawah tarif yang dipatok oleh Pimpinan	Pakaian Dinas Tidak Dapat digunakan oleh Pimpinan pada saat dibutuhkan	Kepala Sub Bagian TU dan RT Gubernur
224	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Tertundanya Medical Check Up rutin Pimpinan	Risiko Operasional	Agenda Pimpinan yang Padat	Terganggu-nya Monitoring kesehatan pimpinan	
225	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	Tidak dapat memenuhi kebutuhan pimpinan yang mendadak	Risiko Operasional	Agenda Pimpinan yang Dinamis yang memerlukan kebutuhan yang mendadak	Terdapat keluhan dari pimpinan	Kepala Sub Bagian TU dan RT Gubernur

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	Pimpinan tidak dapat menerima tamu	Risiko Reputasi	Tamu datang tanpa konfirmasi/koordinasi dan jadwalnya bersamaan dengan agenda lain pimpinan	Menurunkan reputasi pimpinan	Kepala Bagian TU dan RT Pimpinan
227	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Hilangnya arsip inaktif	Risiko Fraud	Kesengajaan menghilangkan / merusak arsip vital oleh arsiparis untuk mendapatkan imbalan	Hilangnya Informasi Penting	Kepala Bagian TU dan RT Pimpinan
228	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	kehilangan atau salah alamat surat	Risiko Operasional	Kesalahan Input data surat masuk	Informasi tidak sampai ke tujuan	Kepala Bagian TU dan RT Pimpinan
229	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	Tertundanya Pencairan dana Pimpinan	Risiko Operasional	Berkas pencairan dana penunjang pimpinan tertunda untuk ditandatangani oleh Pimpinan	Terdapat keluhan dari pimpinan	Kepala Bagian TU dan RT Pimpinan
230	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	Penyesuaian data Pimpinan Baru	Risiko Operasional	Pergantian/Transisi Pimpinan Baru	Tertundanya pembayaran gaji Pimpinan	Kepala Bagian RT SETDA

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Tidak akuratnya Laporan Barang persediaan	Risiko Operasional	Kurang tertibnya penginputan data Barang persediaan pada aplikasi SIM Aset	Laporan Barang persediaan pada akhir periode tidak sesuai	Kepala Bagian RT SETDA
232	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Tertundanya pembelian barang yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	Risiko Operasional	Pembelian barang menunggu reviu TKDN dari Inspektorat	Belum tersedianya Barang ketika diperlukan	Kepala Bagian RT SETDA
233	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Risiko Operasional	Penyedia jasa tidak memenuhi standart spesifikasi yang dibutuhkan	Barang tidak dapat dipakai secara maksimal	Kepala Bagian RT SETDA
234	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terjadi lebih bayar tunjangan keluarga ASN	Risiko Operasional	Rendahnya kesadaran ASN dalam memperbarui data tunjangan keluarga	Temuan pemeriksa	Kepala Bagian RT SETDA
235	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Adanya Revisi SK Pengelola Keuangan	Risiko Operasional	Adanya mutasi/rotasi ASN pengelola keuangan (PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat Penggadaan, Pengelola Barang dan Pengelola Keuangan)	Honor pengelola keuangan tidak diterima tepat waktu	Kepala Bagian RT SETDA
236	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen SPJ keuangan tidak lengkap	Risiko Operasional	Pelaksana kegiatan kurang memahami ketentuan administrasi kelengkapan dokumen SPJ	Proses pembayaran terhambat	Kepala Bagian RT SETDA

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Kesalahan dalam menyusun jurnal penyesuaian laporan keuangan	Risiko Operasional	Kurangnya ketelitan dalam menyusun jurnal penyesuaian laporan keuangan	Laporan keuangan yang disusun belum sesuai dengan ketentuan	Kepala Bagian RT SETDA
238	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Bukti Dokumen Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan	Risiko Operasional	Pelaksana kegiatan kurang memahami ketentuan dalam SHS (Standat Harga Satuan)	Proses pembayaran terhambat	Kepala Bagian RT SETDA
239	Sasaran Kegiatan	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Penyewa tidak jadi menggunakan aset	Risiko Operasional	Jadwal benturan.	Target retribusi tidak tercapai.	Kepala Bagian RT SETDA
240	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Ruangan kurang bersih dan rapi	Risiko Operasional	Petugas kebersihan tidak maksimal dalam membersihkan ruangan	Suasana kerja kurang nyaman	Kepala Bagian RT SETDA
241	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Kerusakan instalasi listrik	Risiko Operasional	Usia pakai instalasi sudah lama	Terganggu-nya kegiatan kantor	Kepala Bagian RT SETDA
242	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak dapat dipenuhi	Risiko Operasional	Permintaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terlalu banyak dan/atau mendadak	Kegiatan pelayanan tidak maksimal	Kepala Bagian RT SETDA
243	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Peralatan rumah tangga tidak dapat digunakan	Risiko Operasional	Kurangnya perawatan peralatan rumah tangga	Terjadinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan	Kepala Bagian RT SETDA

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	Terjadinya kendala dalam penanganan pertolongan pertama pada pasien	Risiko Operasional	Penyediaan bahan logistik obat-obatan dan fasilitas kesehatan terbatas	Pelayanan kesehatan kurang maksimal	Kepala Bagian RT SETDA
245	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	Persiapan fasilitas kunjungan tamu tidak berjalan dengan lancar	Risiko Operasional	Agenda pimpinan berubah	Pelayanan kunjungan tamu tidak maksimal	Kepala Bagian RT SETDA
246	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kenyamanan mobil dinas berkurang	Risiko Operasional	Jadwal pimpinan yang padat	Jadwal servis mobil tertunda	Kepala Bagian RT SETDA
247	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kendaraan dinas tidak dapat beroprasi dengan baik	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi antara pemegang kendaraan dengan koordinator servis kendaraan	Pelaksanaan kegiatan terhambat	Kepala Bagian RT SETDA
248	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terjadi kerusakan pada mebel	Risiko Operasional	Penggunaan mebel relatif tinggi	Penurunan nilai fungsi barang mebel	Kepala Bagian RT SETDA
249	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terjadi kerusakan peralatan kantor	Risiko Operasional	Pemakaian Berlebihan	Kurangnya kenyamanan kerja, Pelayanan kerja tidak maksimal	Kepala Bagian RT SETDA

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Keterlambatan pembayaran pada akhir tahun menunggu anggaran perubahan	Risiko Operasional	Kenaikan tarif / pembayaran	Mendapat teguran dari penyedia layanan	Kepala Bagian RT SETDA
251	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terjadinya kerusakan gedung kantor dan bangunan lainya	Risiko Operasional	Masa Pakai Usia Gedung yang menyusut	Membahaya-kan pengguna gedung, tidak nyaman untuk ditempati	Kepala Bagian RT SETDA

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama									
MoU tidak terlaksana	4	4	16	Ada	1. Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah daerah yang akan mekasanakan kerjasama.	Memadai	3	4	12
Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	4	5	20	Ada	1. Konsultasi publik ulang 2. Pendekatan persuasif kepada masyarakat yang terkena	Memadai	4	4	16
Gagal tercapainya kesepakatan batas	4	5	20	Ada	1. Sosialisasi Permendagri 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah 2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah pusat dan Kab/Kota	Memadai	4	4	16
Dokumen LPPD tidak dapat disusun tepat waktu	4	3	12	Ada	1. Sosialiasai Juknis terkait indikator kinerja kunci pada Kab/Kota dan OPD Provinsi	Memadai	3	3	9
Terlambatnya penyusunan atau revisi naskah kerja sama	4	4	16	Ada	1. Koordinasi dengan OPD Provinsi dan Kab/Kota terkait manfaat kerjasama luar negeri	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Usulan pengesahan DPRD tidak sesuai prosedur	3	3	9	Ada	1. Koordinasi dengan Sekretariat Dewan dan KPU terkait PAW	Memadai	2	3	6
Daerah tidak dapat memenuhi target SPM	3	3	9	Ada	1. Sosialisasi terkait PP no. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimalndan Permendagri 59 th 2021 tentang Penerapann SPM	Memadai	2	3	6
Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau kegagalan dalam menjalankan kontrak kerjasama	3	4	12	Ada	1. Sosialisasi regulasi Permendagri no. 25 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di Luar Negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri 2. Sosialisasi regulasi Permendagri no. 22 tahun 2020 tentang tatacara teknis kerjasama daerah dengan daeah lain dan tata cara teknis kerjasama daeah dengan pihak ketiga.	Memadai	3	3	9
Pelaksanaan kerjasama luar negri kurang maksimal	3	3	9	Ada	1. Koordinasi secara intensiv dengan Pemerintah Kab/Kota	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Evaluas pelakasanaan kerjasama tidak dapat dilakukan	3	3	9	Ada	1. Pelaksaaan monev kerjasamma lingkup Provinsi Jawa Tengah	Memadai	3	2	6
Masyarakat merasa memiliki tanah negara atau tanah aset milik pemerintah	3	4	12	Ada	1. Pendekatan persuasif kepada masyarakat yang menguasai aset	Memadai	3	3	9
Target sertifikasi tanah tidak tercapai	3	3	9	Ada	1. Sosialisasi terkait PTSL Kab/Kota dengan masyarakat	Memadai	2	3	6
Gangguan ketertiban di kantor Gubernur	4	3	12	Ada	1. Pendekatan persuasif kepada koordiantor lapangan unjuk rasa	Memadai	3	3	9
Keterlambatan LKPJ	4	3	12	Ada	1. Konsinyering dengan OPD	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Nama rupabumi tidak terbakukan	3	3	9	Ada	1. Sosialisasi Permendagri no. 2 th 2021 tentang penyelenggaraan nama rupabumi 2. Sosialisasi Peraturan Badan Informasi Geospasial no. 6 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Permendagri 2 th 2021 3. Pemberian Pembinaan teknis input data nama rupabumi melaluio aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) 4. Pemberian rekomendasi usulan nama rupabumi dari Kab/Kota.	Memadai	3	2	6
Biro Hukum									
Kegagalan dalam fasilitasi penyelesaian perkara di pengadilan karena kelemahan dalam pembuktian	3	5	15	Ada	Meningkatkan upaya pendokumentasian dalam administrasi pemerintahan	Memadai	2	5	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	2	5	10	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul rancangan produk hukum daerah	Memadai	1	5	5
produk hukum daerah yang disusun tumpang tindih dan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya	4	1	4	Ada	melakukan sosialisasipelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum	Memadai	3	1	3
Raperda/Raperkada Kab/Kota bertentangan dengan peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi	4	3	12	Ada	Melakukan koordinasi dengan Pemkab/Pemkot	Memadai	2	3	6
Permasalahan / sengketa hukum yang diadukan tidak menemukan solusi	2	3	6	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya	Memadai	1	3	3
Belum terpenuhinya akses masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam proses persidangan	3	4	12	Ada	Koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Jateng	Memadai	2	4	8

Pernyataan Risiko	**Skala/Nilai Risiko yang Melekat**			**Upaya Pengendalian**			**Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian** *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Terjadinya fraud karena pengajuan permohonan pencairan biaya bantuan hukum tidak terverifikasi	2	4	8	Ada	- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan LBH - Meningkatkan jumlah LBH yang bekerjasama dengan PemProv	Memadai	1	3	3
Kesalahan atau penundaan kegiatan	3	5	15	Ada	Meningkatkan dokumentasi dan pencatatan dokumen secara lengkap,	Memadai	2	5	10
Kabupaten kota tidak patuh dalam implementasi P5HAM	3	4	12	Ada	meningkatkan upaya pembinaan HAM di Kabupaten/Kota	Memadai	1	4	4
Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	2	5	5	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul rancangan produk hukum daerah	Memadai	1	5	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Tidak tersedianya Produk Hukum sebagai alat bukti pada saat terjadi sengketa di Pengadilan	3	1	3	Ada	Melakukan sosialisasi kepada OPD terkait dengan pentingnya pendokumentasian dokumen hukum sebagai alat bukti, menyusun SOP pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum	Memadai	2	1	2
Tidak terpenuhinya akses masyarakat dalam pencarian produk hukum	4	1	4	Ada	Melakukan sosialisasi kepada OPD terkait dengan pentingnya pendokumentasian dokumen hukum sebagai alat bukti, menyusun SOP pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum	Memadai	3	1	3
kabupaten/kota belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan produk hukum daerah sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	4	3	12	Ada	Melakukan koordinasi dengan Pemkab/Pemkot	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Raperda/Raperkada yang dimohonkan fasilitasi masih banyak terdapat kekurangan baik terkait materi muatan maupun dasar hukum yuridisnya	4	3	12	Ada	Melakukan koordinasi dengan Pemkab/Pemkot	Memadai	2	3	6
Hilangnya dokumen dan arsip di Biro Hukum	3	4	12	Ada	Meningkatkan pengawasan di area penyimpanan dokumen untuk mencegah akses yang tidak sah	Memadai	2	4	8
Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan	2	4	8	Ada	Pembatasan kewenangan dan akses dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan	Memadai	1	4	4
Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian	2	4	8	Ada	Meningkatkan kepatuhan pelaporan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan	Memadai	1	4	4
Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran	2	5	10	Ada	Meningkatkan kepatuhan pelaporan penatausahaan barang milik daerah	Memadai	1	5	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan	3	4	12	Ada	Meningkatkan dokumentasi dan pencatatan dokumen secara lengkap,	Memadai	2	4	8
Biro Kesejateraan Rakyat									
Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan	2	4	8	Ada	1. Sosialisasi peraturan pelaksanaan hibah 2. Monitoring evaluasi pelaksananaan hibah	Memadai	2	3	6
Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pendidikan, Sosial & Kesehatan	3	4	12	Ada		Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Tidak adanya informasi yang didapat terkait kebijakan maupun data yg update serta terintegrasi dengan OPD Ampuan dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	4	12	Ada		Memadai	3	3	9
Terdapat usulan hibah yang tidak memenuhi standar masuk dalam DPA	3	4	12	Ada	1. Koordinasi dengan OPD terkait dalam perencanaan hibah 2. Koordinasi dengan pengusul pokir	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Realisasi hibah pada akhir periode	4	3	12	Ada	1. Koordinasi dengan pengusul pokir 2. Surat teguran kepada lembaga perihal laporan pertanggungjawaban hibah	Memadai	3	3	9
Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar bidang Pendidikan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Pendidikan	Memadai	3	3	9
Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar bidang Kesehatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Kesehatan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar bidang Sosial tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Sosial	Memadai	3	3	9
Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Memadai	3	3	9
BIRO BUMD									
Pembagian dividen yang tidak sesuai ketentuan	1	5	5	ada	pembahasan bersama pada desk pembagian dividen BUMD Keuangan	Memadai	1	3	3
Laporan kinerja tidak valid	3	5	15	Ada	Melakukan audit KAP terkait laporan kinerja keuangan BUMD Keuangan	Memadai	2	5	10
Keterlambatan penyampaian laporan keuangan BUMD	3	3	9	ada	teguran lisan kepada penanggung jawab masing-masing BUMD Keuangan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Ketidaksepakatan antara BUMD dan Pemda terkait besaran dividen	1	4	4	ada	pembahasan bersama pada desk pembagian dividen BUMD Keuangan	Memadai	1	3	3
Pemerintah Provinsi mendapatkan dividen yang lebih rendah dari periode sebelumnya	4	4	16	ada	monitoring dan evaluasi kinerja secara On The Spot ke BUMD	Memadai	3	4	12
Keterlambatan Pengumpulan Laporan	2	5	15	Ada	Melakukan pemantauan menggunakan alat komunikasi seperti WA / email	Memadai	2	5	10
Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD	3	5	15	Ada	Membuat ceklist dokumen	Memadai	2	5	10
Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	3	5	15	Ada	Monitoring Kinerja triwulanan BUMD	Memadai	2	5	10
Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	3	5	15	Ada	Monitoring Kinerja triwulanan BUMD	Memadai	2	5	10
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Triwulanan BUMD terlambat	4	2	8	Ada	Teguran lisan ke penanggung jawab masing-masing BUMD Keuangan	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Keterlambatan penyusunan RKAP oleh BUMD	2	5	10	Ada	Teguran kepada BUMD Keuangan Terkait	Memadai	1	5	5
Biro Perekonomian									
Hasil keputusan rakor tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi	3	5	12	Ada	Koordinasi terkait hasil rakor yang sudah menjadi keputusan	Memadai	3	4	12
Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan masih parsial	4	4	16	Ada	- Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Memadai	4	3	12
Data Tidak Akurat atau Tidak Valid	3	4	12	Ada	verifikasi data secara berkala dengan berkoordinasi antar instansi	Memadai	3	3	9
2. Sinkronisasi program/kegiatan	3	4	12	Ada	Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Rekomendasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi Sumber Daya Mineral menjadi parsial	4	4	16	Ada	- Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	Memadai	4	3	12
Rekomendasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian menjadi parsial	4	4	16	Ada	- Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian	Memadai	4	3	12
Reputasi geopark menurun	4	4	16	Ada	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Energi Sumber Daya Mineral	Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Pelaku usaha mengalami kendala dalam pengembangan Low Carbon Rice dan Sustainable Food	4	4	16	Ada	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi pengembangan Low Carbon Rice dan Sustainable Food	Memadai	4	3	12
1. Pengolahan dan penyajian data menjadi kurang efektif dan efisien.	2	4	8	Ada	Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	1	2	2
3. Gangguan/keterlambatan acara	2	2	4	Ada	Fasilitasi koordinasi awal dan ceklist kegiatan	Memadai	1	2	2
1, Permintaan data/kegiatan prioritas di bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dipenuhi Kab/Kota	3	4	12	Ada	Fasilitasi rapat atau Rakor/FGD atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
2. Belum ada sinkronisasi program/kegiatan prioritas daerah	3	4	12	Ada	Rapat atau pelaksanaan Rakor atau penyusunan strategi/rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
1. Gangguan/keterlambatan acara	2	2	4	Ada	ceklist kebutuhan rapat	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
2. Gangguan sistem/logistik/jaringan	2	4	8	Ada	Cek kebutuhan rapat sebelum acara dimulai	Memadai	1	2	2
1. Pengolahan dan penyajian data menjadi kurang efektif dan efisien.	2	4	8	Ada	Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	1	2	2
2. Sinkronisasi program/kegiatan menjadi kurang efektif	3	4	12	Ada	Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
4. Gangguan sistem/logistik/jaringan	2	4	8	Ada	Fasilitasi koordinasi awal dan cek lokasi awal	Memadai	1	2	2
1, Permintaan data/kegiatan prioritas di bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dipenuhi Kab/Kota	3	4	12	Ada	Fasilitasi rapat atau Rakor/FGD atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
2. Belum ada sinkronisasi program/kegiatan prioritas daerah	3	4	12	Ada	Rapat atau pelaksanaan Rakor atau penyusunan strategi/rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
Gangguan/keterlambatan acara	2	2	4	Ada	ceklist kebutuhan rapat	Memadai	1	2	2
Gangguan sistem/logistik/jaringan	2	4	8	Ada	Cek kebutuhan rapat sebelum acara dimulai	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Penurunan fungsi DAS di Jawa Tengah	4	4	16	Ada	- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) - Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Memadai	4	3	12
Munculnya pola pengelolaan mangrove yang terpaku pada satu sektor	4	4	16	Ada	- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi program oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah - Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi dan koordinasi program oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah	Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan rencana/target	4	4	16	Ada	- Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah pada kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah pada sektor pemanfaatan energi - Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM pada kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah pada sektor pemanfaatan energi	Memadai	4	3	12
data kebutuhan pupuk bersubsidi tidak sesuai	4	4	16	Ada	- Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi	Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Rendahnya kualitas garam rakyat dan penurunan produktivitas dan hasil panen	4	4	16	Ada	- Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka koordinasi kegiatan pengendalian harga garam rakyat dan pemanfaatan lahan budidaya perikanan darat/tambak di Jawa Tengah - Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka koordinasi kegiatan pengendalian harga garam rakyat dan pemanfaatan lahan budidaya perikanan darat/tambak di Jawa Tengah	Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Tidak sesuainya kuota/alokasi BBM subsidi untuk nelayan	4	4	16	Ada	- Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka koordinasi kegiatan penyaluran BBM Subsidi dan BBM Industri untuk Kapal Perikanan - Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka koordinasi kegiatan penyaluran BBM Subsidi dan BBM Industri untuk Kapal Perikanan	Memadai	4	3	12
Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal	4	4	16	Ada	- Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal - Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal	Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Rendahnya penerapan fortifikasi beras	4	4	16	Ada	- Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka fasilitasi penerapan fortifikasi beras - Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi penerapan fortifikasi beras	Memadai	4	3	12
Kesenjangan penyebaran informasi dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait DBHCHT	4	4	16	Ada	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang-undangan bidang cukai	Memadai	4	3	12
Hilangnya dokumen dan arsip di Biro Infrastruktur dan SDA	3	4	12	Ada	Meningkatkan pengawasan di area penyimpanan dokumen untuk mencegah akses yang tidak sah	Memadai	2	4	8
Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan	2	4	8	Ada	Pembatasan kewenangan dan akses dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan	Memadai	1	4	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian	2	4	8	Ada	Meningkatkan kepatuhan pelaporan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan	Memadai	1	4	4
Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran	2	5	10	Ada	Meningkatkan kepatuhan pelaporan penatausahaan barang milik daerah	Memadai	1	5	5
Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan	3	4	12	Ada	Meningkatkan dokumentasi dan pencatatan dokumen secara lengkap,	Memadai	2	4	8
Biro Pembangunan Daerah									
Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah atau program strategis tidak tercapai	4	4	16	Ada	Melakukan koodinasi dengan OPD terkait dan Kab/Kota untuk IKU atau proyek strategis yang belum tercapai	Memadai	3	4	12
Terdapat masalah teknis pada sistem aplikasi penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dan anggaran yang akan di simulasikan	3	3	9	Ada	Pemutakhiran sistem E-RKO	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Kendala operasional dalam proses *updating* data pelaksanaan Bankeu secara manual	4	3	12	Ada	1. Meminta masing-masing Kabupaten/Kota untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor 2. Penambahan sasaran OPD pengelola kegiatan Bankeu yang diundang dalam Rakor	Memadai	4	2	8
Data kinerja pada *e-controlling* kinerja tidak valid	4	2	8	Ada	Pelaksanaan monitoring secara berkala kepada OPD, surat tentang notifikasi input capaian kinerja TW	Memadai	3	2	6
Ketidakselarasan antar indikator pada dokumen perencanaan pada biro - biro lingkup Setda	3	4	12	Ada	Desk Penyusunan Dokumen Perencanaan yang melibatkan pelaksana program dan kegiatan pada Biro lingkup Setda	Memadai	2	4	8
informasi yang disajikan tidak relevan	3	5	15	Ada	1. menyusun tim pengelola media informasi digital biro 2. membuat SOP pengelolaan media informasi digital	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Data penyusunan RKO perangkat daerah tidak lengkap	3	3	9	Ada	Desk/Koordinasi Penyusunan RKO	Memadai	2	3	6
Data penyusunan RK (APBN) perangkat daerah belum sesuai/tidak lengkap	3	4	12	Ada	Koordinasi dengan SKPD Pengelola dan DJPB Provinsi Jawa Tengah	Memadai	3	3	9
Data RKO (APBD) perangkat daerah tidak selesai tepat waktu	3	3	9	Ada	Desk/Koordinasi Penyusunan RKO	Memadai	2	3	6
Pelaksana kegiatan PSN tidak melaporkan progres dan hasil kegiatan secara periodik	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan pelaksana PSN di Jawa Tengah	Memadai	2	3	6
Target keuangan dan fisik RKO berubah	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan Subbag Program SKPD	Memadai	2	3	6
Informasi paket pekerjaan yang dilaksanakan tidak lengkap dan valid	3	2	6	Ada	Koordinasi dengan Subbag Program SKPD sebelum monitoring	Memadai	2	3	6
Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan	4	4	16	Ada	1. Updateing Aplikasi 2. bintek aplikasi SIVERO bagi admin baru	Belum Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	1. Penyusunan Surat Edaran Sekda Kepada Bupati/Walikota 2. Pemantauan progres verifikasi RKO pada APBD Perubahan TA. 2026	Memadai	3	2	6
Keterlambatan pengiriman laporan bulanan melalui aplikasi	4	3	12	Ada	1. Pengumpulan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor 2. Desk progres pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota	Memadai	4	2	8
Data yang dilaporkan berbeda dengan kondisi riil di lapangan	4	3	12	Ada	1. Meminta masing-masing Kabupaten/Kota untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor 2. Penambahan sasaran monitoring pada APBD Perubahan TA. 2026	Memadai	4	2	8

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Proses verifikasi capaian *progress* pelaksanaan kegiatan Bankeu terhambat	4	3	12	Ada	1. Meminta masing-masing Kabupaten/Kota untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor 2. Penambahan sasaran OPD pengelola kegiatan Bankeu yang diundang dalam Rakor	Memadai	4	2	8
Data kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kaidah pelaporan	4	3	12	Ada	Pemantauan dan evaluasi progres pelaksanaan kegiatan APBD secara berkala melalui Aplikasi e-controlling APBD.	Memadai	3	3	9
Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid	4	5	20	Ada	Memaksimalkan pelaksanaan pendampingan penggunaan aplikasi bantuan keuangan Desa	Memadai	4	4	16
Penyajian laporan hasil evaluasi kinerja beberapa Biro lingkup Setda belum sesuai ketentuan	4	3	12	Ada	Desk Penyusunan Laporan LKjIP Setda bersama Biro lingkup Setda	Memadai	3	3	9
Data kepegawaian tidak valid	3	4	12	Ada	Koordinasi dengan Biro Organisasi dan Bendahara Gaji Biro Umum	Memadai	2	4	8

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Berkas keuangan tidak lengkap sesuai dengan prosedur	3	4	12	Ada	1. Verifikasi BPP Biro terkait kelengkapan administrasi 2. Percepatan penyelesaian administrasi	Memadai	3	3	9
Kerusakan arsip	3	4	12	Ada	Tarikan otomatis aplikasi surat elektronik	Memadai	2	3	6
Ketidaksesuaian pencatatan aset dengan kondisi fisik	3	5	15	Ada	1. Pencatatan kebutuhan aset per bagian melalui RKBMD 2. Pengajuan permohonan kebutuhan ke Biro Umum 3. Koordinasi Intens	Memadai	3	3	9
Hilangnya dan atau rusaknya aset	4	4	16	Ada	1. Pembaruan data aset internal Biro Bangda secara berkala 2. Pengembalian barang/aset yang rusak dengan pencatatan dan dokumentasi	Memadai	3	4	12
Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan	4	4	16	Ada	1. Adanya agenda digital pada kalender pimpinan 2. Adanya informasi agenda kegiatan dengan media elkektronik	Memadai	3	3	9
Spesifikasi barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam kontrak	3	4	12	Ada	rekonsiliasi pengadaan aset bersama biro umum	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Biro APBJ									
realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa	5	4	20	Ada	Pendampingan dan Sosialisasi pencapaian ITKP	Memadai	5	4	20
1. Perencanaan pengadaan tidak matang 2. Data RUP tidak valid	5	4	20	Ada	1. Reviu RUP 2. PIC Perencanaan	Memadai	4	4	16
Penayangan etalase usulan OPD terlambat	2	3	6	Ada	Sosialisasi kelengkapan Dokumen kepada Seluruh SKPD	Memadai	2	2	4
Pemecahan paket pengadaan	2	3	6	Ada	Diloakukan Desk Perencanaan secara Periodik untuk mengamati tiap detail pemaketan yang di buat oleh masing2 SKPD	Memadai	2	2	4
Pemenuhan dokumen MCP terlambat	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan Inspektorat terkait pemenuhan dokumen dan sosialisasi kepada OPD Strategis	Memadai	2	3	6
Arsip tersebar di berbagai tempat	3	3	9	Ada	Melakukan penataan arsip semaksimal mungkin sesuai kaidah2 penataan arsip		2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
pencatatan aset tidak sesuai kondisi fisik aset	3	3	9	Ada	secara berkala dilakukan rekonsiliasi internal terhadap aset dan senantaia melakukan updating KIB	Memadai	3	2	6
Data kepegawaian tidak valid	2	3	6	Ada	melakukann koordinasindengan pegawain terkait	Memadai	2	2	4
Pembayaran Gaji Berkala terlambat	2	3	6	Ada	Melakukan Inventarisasi jumlah pegawai yang akan mendapat KGB pada periode selanjutnya dan segera bersurat ke Biro Organisasi agar tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	2	4
Dokumen perencanaan/evaluasi terlambat disusun	2	3	6	Ada	berkoordinasi dengan masing2 sub bagian untuk melakukan penyusnan anggaran di awal	Memadai	2	2	4
Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan	2	3	6	Ada	Berkoordinasi dengan masing2 OPD agar dalam mengirimkan surat undangan agar tidak hanya melalui 1 platofrm aplikasi.	Memadai	2	2	4
publikasi konten tidak sesuai dengan jadwal	2	3	6	Ada	berkoordinasi dengan pemangku kepentingan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Spesifikasi barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam kontrak	2	3	6	Ada	Sosialisasi anti korupsii, dan dilakukan pembinaan SDM	Memadai	2	2	4
Pembayaran invoice tertunda	2	3	6	Ada	dilakukan koordinasi dan peringatan dengan pihak penyedia	Memadai	2	2	4
Data Survey tidak valid	2	3	6	Ada	mengurangi kontak dengan responden kecuali dalam hal penyebaran kuesioner	Memadai	2	2	4
Tidak dapat membuat billing dan pelaporan	2	2	4	Ada	melakukan koordinasi dengan pihak BPKAD	Memadai	2	1	2
Terdapat peserta Rapat Koordinasi Evaluasi	2	3	6	Ada	Perancanaan Yang matang didukung anggran yang	Memadai	2	2	4
Pengadaan barang/jasa dengan spesifikasi dan kebutuhan yang sama tidak dilakukan secara konsolidasi	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan Pemangku Kebijakan (LKPP) dan Seluruh User (SKPD)	Memadai	2	2	4
Sanggah / Sanggah Banding / Aduan	3	3	9	Ada	diilakukan bimtek kepada seluruh pokja Pemilihan	Memadai	2	3	6
Penyampaian usulan SHS yang double	3	4	12	Ada	sosialsisasi kepada seluruh SKPD yang menyampaikan	Memadai	3	3	9
Gangguan teknis pada sistem	4	4	16	Ada	Sosialisasi dan pemdampingan terhadap	Memadai	1	3	3
Overload pada jaringan	3	5	15	Ada	backup jaringan	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Pelaku Usaha terkendala mendaftar SPSE.	4	3	12	Ada	Pendampingan dan pengarahan terhadap	Memadai	3	3	9
Pelaku Pengadaan terkendala dalam proses	4	3	12	Ada	Pendampingan pelaku PBJ saat pendaftaran akun	Memadai	2	3	6
Proses Pengadaan Tertunda	3	4	12	Ada	Koordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan	Memadai	2	3	6
Koneksi internet yang tidak stabil.	3	4	12	Ada	Backup jaringan	Memadai	3	3	9
Realisasi PBJ OPD tidak terbaca	2	5	10	Ada	Pendampingan pengisian dan Pengembangan Sistem	Memadai	3	3	9
Terhambatnya proses PBJ yang masuk dalam	2	5	10	Ada	Pelaksanaan pendampingan kepada	Memadai	1	5	5
Terdapat aduan dari masyarakat terkait	3	3	9	Ada	Sosialisasi kepada masyarakat terkait alur	Memadai	2	3	6
Materi tidak tersampaikan kepada	3	3	9	Ada	Sosialisasi pencegahan korupsi pada internal SDM	Memadai	2	3	6
Pelaku Usaha terkendala mendaftar marketplace	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan Pendampingan terhadap	Memadai	2	3	6
Koneksi internet peserta tidak stabil	3	3	9	Ada	Sosialisasi secara luring dan pemdampingan	Memadai	3	3	9
Integrasi Antar Sistem mengalami kendala	3	3	9	Belum Ada	-	Belum Memadai	3	3	9
Resistensi/penolakan penggunaan sistem baru	2	4	8	Ada	Sosialisasi dan pendampingan terhadap	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
-Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indikator	2	4	8	Ada	Melakukan mentoring, koordinasi dan mendorong	Memadai	1	4	4
Pengoperasian sistem aplikasi terkendala	2	3	6	Ada	Sosialisasi dan pemdampingan terhadap	Memadai	3	3	9
Resistensi/penolakan penggunaan sistem baru	2	3	6	Ada	Penjelasan dan pendampingan Pelaku PBJ	Memadai	2	3	6
Keterbatasan dalam penyusunan	2	3	6	Belum Ada	-	Belum Memadai	2	3	6
Sistem yang dikembangkan belum	2	3	6	Belum Ada	-	Belum Memadai	2	3	6
Resistensi/penolakan penggunaan sistem baru	2	3	6	Ada	Pengarahan lebih lanjut terhadap Pelaku PBJ	Memadai	2	3	6
Tidak semua SDM PBJ mengikuti kegiatan	2	3	6	Ada	- Mengusulkan/mengirimka	Memadai	1	3	3
Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indikator	2	3	6	Ada	Menginfokan dan berkoordinasi kepada OPD	Memadai	1	3	3
Terhambatnya capaian UKPBJ Provinsi Jawa	2	3	6	Ada	Koordinasi dengan LKPP RI untuk membahas	Memadai	1	3	3
Tidak terpenuhinya target peserta Rakor UKPBJ	2	3	6	Ada	- Waktu penyampaian undangan kepada UKPBJ	Memadai	1	3	3
Ketidaksesuaian antara sistem pengadaan	2	2	4	Ada	Pengarahan pelaksanaan pengadaan melalui sistem	Memadai	2	3	6
Sistem yang dikembangkan belum	1	3	3	Belum Ada	-	Belum Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Resistensi/penolakan penggunaan sistem baru	1	3	3	Ada	Pendampingan pelaku PBJ terkait penggunaan sistem	Memadai	1	3	3
Perbedaan pemahaman informasi	1	3	3	Ada	Pengarahan terhadap Pelaku PBJ terkait	Memadai	2	3	6
Biro Organisasi									
Konsep kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang	4	4	16	Ada	Penyesuaian Kebijakan Pemberian TPP	Memadai	3	4	12
Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	4	4	16	Ada	Melaksanakan fasilitasi penyusunan	Memadai	4	3	12
Proses pembangunan ZI tidak berjalan	4	4	16	Ada	Melakukan pembinaan pembangunan zona	Belum Memadai	3	4	12
RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan	4	4	16	Ada	Meningkatkan pemahaman pentingnya reformasi	Memadai	3	4	12
Kab/Kota tidak melaksanakan RB secara	4	3	12	Ada	Meningkatkan pemahaman pentingnya reformasi	Memadai	3	3	9
Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-	4	4	16	Ada	Penunjukan Pengelola dan Pengurus Barang di setiap	Memadai	3	4	12
Konflik dengan pihak lain	4	3	12	Ada	Inventarisasi dan pencatatan aset dalam	Memadai	3	3	9
Layanan kepegawaian terlambat atau tidak	3	4	12	Ada	Menyampaikan nominatif pegawai yang memenuhi	Memadai	3	3	9
Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai	4	4	16	Ada	Meningkatkan pemahaman dan mendorong penerapan	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Jam Kerja tidak dipatuhi	4	3	12	Ada	Meningkatkan pemahaman pegawai terkait tindakan	Memadai	3	3	9
Pelayanan dan pelaksanaan tugas tidak	4	4	16	Ada	Penguatan penyusunan Standar Operasional	Memadai	4	3	12
SP tidak diterapkan di UPP	4	4	16	Ada	meningkatkan pemahaman dan komitmen UPP dalam	Memadai	3	3	9
Peta proses bisnis tidak digunakan sebagai acuan	4	3	12	Ada	Penguatan penyusunan peta proses bisnis sesuai	Memadai	3	3	9
Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi	3	4	12	Ada	Melaksanakan visitasi/fasilitasi	Memadai	3	3	9
Penilaian tingkat kematangan organisasi	3	4	12	Ada	Melaksanakan fasilitasi penilaian kematangan	Memadai	3	3	9
Evaluasi jabatan tidak dilakukan	4	4	16	Ada	Melakukan penyesuaian dengan dinamika tata	Memadai	3	3	9
Pendampingan dan pelaksanaan analisis	4	4	16	Ada	Monev analisis jabatan OPD dan Kab/Kota	Memadai	3	4	12
Informasi jabatan tidak tersusun	3	4	12	Ada	Melakukan penyesuaian dengan dinamika tata	Memadai	3	3	9
Dokumen ABK tidak tersusun	3	4	12	Ada	Melakukan penyesuaian dengan dinamika tata	Memadai	3	3	9
SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan	4	4	16	Ada	Melakukan penyesuaian dengan dinamika tata	Memadai	4	3	12
Dokumen tidak tersusun sesuai pedoman atau	3	4	12	Ada	Meningkatkan pemahaman penyusunan dokumen	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Pegawai mengikuti pelatihan yang tidak	4	3	12	Ada	Memberikan penawaran diklat yang sesuai dengan	Memadai	3	3	9
TND tidak dilaksanakan secara seragam	4	4	16	Ada	Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap	Memadai	3	4	12
ASN tidak mematuhi ketentuan pakaian dinas	4	3	12	Ada	Mengoptimalkan pengawasan penggunaan	Memadai	3	3	9
Data evaluasi tidak lengkap atau salah input	3	4	12	Ada	- Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi dan Tim	Memadai	3	3	9
Penilaian tidak mencerminkan kinerja	4	3	12	Ada	meningkatkan pemahaman dan komitmen	Memadai	3	3	9
Data SKM tidak mencerminkan persepsi	3	4	12	Ada	melakukan penyempurnaan aplikasi	Memadai	3	3	9
Penilaian kepatuhan rendah	3	4	12	Ada	Meningkatkan komitmen UPP dalam	Memadai	3	3	9
Inovasi berhenti dan tidak berkelanjutan	4	3	12	Ada	Meningkatkan budaya inovasi di Pemprov Jateng	Memadai	3	3	9
Inovasi tidak lolos seleksi KIPP	3	4	12	Ada	Meningkatkan partisipasi OPD Prov Jateng dalam	Memadai	3	3	9
Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan	4	4	16	Ada	Meningkatkan komitmen Kepala Daerah di Jateng	Memadai	3	4	12
Perubahan jadwal perencanaan dan evaluasi	4	3	12	Ada	Melakukan monitoring progres secara periodik	Memadai	3	3	9
Terdapat salah input anggaran dalam sistem	4	3	12	Ada	Melakukan pengecekan kembali sebelum finalisasi	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Rencana kerja yang disusun tidak sesuai	4	3	12	Ada	Melakukan review dokumen rencana kerja	Memadai	3	3	9
Capaian kinerja tidak berdasarkan data yang	4	3	12	Ada	Penerapan mekanisme verifikasi berjenjang: unit	Memadai	3	3	9
Terdapat barang milik daerah yang tidak terdata	4	3	12	Ada	Inventarisasi barang milik daerah berkala	Memadai	3	3	9
Tamu tidak terfasilitasi dengan layak	4	3	12	Ada	Penyediaan ruang tamu atau ruang tunggu.	Memadai	3	3	9
Barang milik daerah mengalami kerusakan	3	4	12	Ada	Pencatatan kondisi barang dalam Kartu Inventaris	Memadai	3	3	9
Barang menjadi tidak dapat digunakan	4	3	12	Ada	Mekanisme usulan perbaikan barang melalui	Memadai	3	3	9
Barang digunakan tanpa izin untuk keperluan di	4	4	16	Ada	Penunjukan Pengelola dan Pengurus Barang di setiap	Memadai	3	4	12
Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat	4	4	16	Ada	Adanya mekanisme permintaan perbaikan	Memadai	3	4	12
Biro Umum									
Kesalahan penyusunan sambutan, keynote speech, dan makalah	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan LS (Leading Sector)	Memadai	2	3	6
Terjadinya kerusakan BMD	4	4	16	Ada	1) Mengajukan daftar kendaraan yang akan	Memadai	3	4	12
Editing narasi berita pimda terhambat	2	4	8	Ada	Mempunyai SK Narahubung antar lembaga	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Tidak dapat memenuhi kebutuhan pimpinan	1	3	3	Ada	Koordinasi dengan penyedia jasa	Memadai	1	2	2
Perolehan materi dan bahan publikasi terbatas	1	4	4	Ada	Koordinasi dengan LS (Leading Sector)	Memadai	1	3	3
Produksi Konten media sosial PPID terlambat	2	3	6	Ada	Memperbarui SK PPID	Memadai	2	2	4
Adanya keterlambatan dalam penyampaian	1	3	3	Ada	Adanya laporan pembelian media cetak	Memadai	1	2	2
Teknis pelaksaaan acara berubah	3	3	9	Ada	Mediasi dan koordinasi dengan Leading Sector	Memadai	3	2	6
Tidak dapat memfasilitasi permohonan pengawalan	3	3	9	Ada	Mediasi dan koordinasi dengan Leading Sector	Memadai	2	3	6
Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan	2	3	6	Ada	Rakor keprotokolan Kab/Kota dan Lembaga	Memadai	2	2	4
Keterlambatan Pengadaan Pakaian	2	3	6	Ada	Koordinasi dengan penyedia jasa pengadaan pakaian dinas	Memadai	2	2	4
Tertundanya Medical Check Up rutin Pimpinan	2	3	6	Ada	Penjadwalan rutin medical check-up Pimpinan	Memadai	2	2	4
Tidak dapat memenuhi kebutuhan pimpinan	1	3	3	Ada	Koordinasi dengan penyedia jasa	Memadai	1	2	2
Pimpinan tidak dapat menerima tamu	3	3	9	Ada	Koordinasi dan reschedule jadwal kunjungan	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Hilangnya arsip inaktif	2	4	8	Ada	Pembentukan SK Pengelola Arsip SETDA	Memadai	2	3	6
kehilangan atau salah alamat surat	2	3	6	Ada	Membuat buku agenda dan ekspedisi	Memadai	2	2	4
Tertundanya Pencairan dana Pimpinan	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan TU Pimpinan perihal	Memadai	1	4	4
Penyesuaian data Pimpinan Baru	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan BKD dan TU Pimpinan perihal	Memadai	1	4	4
Tidak akuratnya Laporan Barang persediaan	4	3	12	Ada	Melaksanakan rekonsiliasi barang persediaan setiap	Memadai	3	3	9
Tertundanya pembelian barang yang sesuai	4	3	12	Ada	Penyusunan dokumen RKBMD secara akurat	Memadai	3	3	9
Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi	3	3	9	Ada	Melakukan identifikasi kebutuhan barang yang	Memadai	2	3	6
Terjadi lebih bayar tunjangan keluarga ASN	3	3	9	Ada	Membagikan SKUMPTK kepada pegawai yang di isi	Memadai	2	3	6
Adanya Revisi SK Pengelola Keuangan	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan Biro Hukum dalam pembuatan	Memadai	1	4	4
Dokumen SPJ keuangan tidak lengkap	4	2	8	Ada	Melakukan sosialisasi kepada pelaksana kegiatan	Memadai	3	2	6
Kesalahan dalam menyusun jurnal	3	2	6	Ada	Pelatihan kompetensi penyusun laporan	Memadai	2	2	4
Bukti Dokumen Perjalanan Dinas tidak	3	2	6	Ada	Melakukan sosialisasi kepada pelaksana kegiatan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Penyewa tidak jadi menggunakan aset	2	3	9	Ada	Mempublikasikan layanan pada sistem	Memadai	2	2	4
Ruangan kurang bersih dan rapi	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan penyedia jasa untuk	Memadai	2	3	6
Kerusakan instalasi listrik	2	4	8	Ada	1. Dilakukan pengecekan secara berkala	Memadai	2	3	6
Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang	2	3	6	Ada	Melakukan pemetaan atau penentuan kebutuhan	Memadai	2	2	4
Peralatan rumah tangga tidak dapat digunakan	2	3	6	Ada	Melakukan pemetaan atau penentuan kebutuhan	Memadai	2	2	4
Terjadinya kendala dalam penanganan pertolongan	2	3	6	Ada	Melakukan pemetaan atau penentuan kebutuhan obat	Memadai	2	2	4
Persiapan fasilitas kunjungan tamu tidak	2	3	6	Ada	Koordinasi dan komunikasi dengan Pimpinan	Memadai	2	2	4
Kenyamanan mobil dinas berkurang	2	3	6	Ada	Pengecekan service secara berkala mobil dinas dan	Memadai	2	2	4
Kendaraan dinas tidak dapat beroprasi dengan	3	3	9	Ada	Pengecekan service secara berkala mobil dinas dan	Memadai	2	3	6
Terjadi kerusakan pada mebel	2	3	6	Ada	Dilakukan pemeliharaan mebel secara berkala	Memadai	2	2	4
Terjadi kerusakan peralatan kantor	3	3	9	Ada	Dilakukan pemeliharaan secara rutin	Memadai	2	2	4
Keterlambatan pembayaran pada akhir	2	3	6	Ada	Melakukan efisiensi penggunaan energi listrik	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	**Skala/Nilai Risiko yang Melekat**			**Upaya Pengendalian**			**Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian** *(diisi apabila keterangan pada*		
	Skala Probilitas	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**
Terjadinya kerusakan gedung kantor dan	3	3	9	Ada	Melakukan pemeliharaan gedung secara berkala	Memadai	2	3	6

Tabel
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama				
MoU tidak terlaksana	12	Asisten Pemerintahan dan Kesejahateraan Rakyat	Tidak sinkronnya tujuan antar Pemerintah Provinsi daerah dengan Pemerntahan Luar daerah	Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.
Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	16	Asisten Pemerintahan dan Kesejahateraan Rakyat	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi	Tertundanya penetapan lokasi pembangunan
Gagal tercapainya kesepakatan batas	16	Asisten Pemerintahan dan Kesejahateraan Rakyat	Perbedaan persepsi atau kepentingan antar daerah	Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah
Terlambatnya penyusunan atau revisi naskah kerja sama	12	Kepala Biro Pemerintahan Otda	Kurangnya komitmen dari anggota tim terhadap usulan kerjasama	Gagalnya inisiasi kerja sama dan menurunnya kepercayaan pihak luar negeri terhadap Jawa Tengah
Biro Hukum				
Kegagalan dalam fasilitasi penyelesaian perkara di pengadilan karena kelemahan dalam pembuktian	10	Asisten Pemerintahan dan Kesejahateraan Rakyat	Kelemahan pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan	Potensi pengeluaran keuangan atau aset daerah karena putusan Pengadilan akibat kelemahan dalam pembuktian
Kesalahan atau penundaan kegiatan	10	Kepala Biro Pemerintahan Otda	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran
BIRO BUMD				

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Laporan kinerja tidak valid	10	Kepala Biro BUMD	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat
Pemerintah Provinsi mendapatkan dividen yang lebih rendah dari periode sebelumnya	12	Kepala Biro BUMD	Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)	Berpengaruh terhadap penerimaan PAD
Keterlambatan Pengumpulan Laporan	10	Kepala Biro BUMD	Laporan dari unit-unit di bawah BLUD (misal: poliklinik, instalasi rawat inap) tidak dikirim tepat waktu	Monev tidak dapat dilakukan sesuai jadwal triwulanan
Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD	10	Kepala Biro BUMD	Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD	Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditola
Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	10	Kepala Biro BUMD	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi	Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah
Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	10	Kepala Biro BUMD	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Keuangan	Kinerja BUMD Keuangan tidak bertambah baik
Biro Perekonomian				

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Hasil keputusan rakor tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi	12	Asisten Perekonomian	Instansi memiliki Program Prioritas yang Berbeda	potensi penyimpangan atau kegagalan program tidak terdeteksi dini
Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan masih parsial	12	Asisten Perekonomian	Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika regulasi	Rekomendasi kebijakan belum mendorong ketahanan pangan di Jawa Tengah
Rekomendasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi Sumber Daya Mineral menjadi parsial	12	Kepala Biro Perekonomian	Tidak ada integrasi data Monev antar OPD	Rekomendasi tidak relevan
Rekomendasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian menjadi parsial	12	Kepala Biro Perekonomian	Pengembangan geopark tidak menjadi prioritas kegiatan.	rendahnya tingkat kunjungan wisatawan dan perekonomian wilayah sekitar geopark
Reputasi geopark menurun	12	Kepala Biro Perekonomian	evaluasi atas efektivitas hasil fasilitasi tidak mencakup seluruh objek yang diberikan fasilitas	tidak ada pengembangan low carbon rice dan suistainable food
Pelaku usaha mengalami kendala dalam pengembangan Low Carbon Rice dan Sustainable Food	12	Kepala Biro Perekonomian	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran
Penurunan fungsi DAS di Jawa Tengah	12	Kepala Biro Perekonomian	Kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) menurun	Kerugian ekonomi masyarakat dan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Munculnya pola pengelolaan mangrove yang terpaku pada satu sektor	12	Kepala Biro Perekonomian	Pengelolaan mangrove terpisah-pisah	Ekosistem mangrove tidak dapat hidup dengan optimal
Pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan rencana/target	12	Kepala Biro Perekonomian	Menurunnya potensi manajemen energi pada sektor pemanfaatan energi	Output dari kegiatan manajemen energi tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan
data kebutuhan pupuk bersubsidi tidak sesuai	12	Kepala Biro Perekonomian	Penyaluran pupuk bersubsidi terhambat	pupuk tidak tersalurkan secara merata dan tepat sasaran
Rendahnya kualitas garam rakyat dan penurunan produktivitas dan hasil panen	12	Kepala Biro Perekonomian	Produksi garam dan hasil budidaya perikanan darat/tambak mengalami penurunan	- Garam rakyat tidak terserap oleh Industri secara maksimal - Kerugian finansial bagi pembudidaya
Tidak sesuainya kuota/alokasi BBM subsidi untuk nelayan	12	Kepala Biro Perekonomian	Masih banyak kapal perikanan yang belum terdata	Nelayan kesulitan mendapatkan BBM pada saat akan melaut
Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal	12	Kepala Biro Perekonomian	Adanya lahan produktif yang tidak digunakan masyarakat untuk budidaya bahan baku pangan lokal	1. Bahan Baku pangan local sangat terbatas 2. Kesulitan mendapatkan pelaku usaha pangan lokal
Rendahnya penerapan fortifikasi beras	12	Kepala Biro Perekonomian	Perencanaan berbasis data yang lemah	Fortifikasi bisa berjalan tanpa sasaran yang tepat (miskin data) dan tidak efektif menyasar kelompok membutuhkan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Kesenjangan penyebaran informasi dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait DBHCHT	12	Kepala Biro Perekonomian	Keterbatasan data yang dimiliki Kab/Kota	tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan memberikan rekomendasi/solusi
Biro Pembangunan Daerah				
Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah atau program strategis tidak tercapai	12	Asisten Perekonomian	1. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD kurang mendukung dalam upaya pencapaian indikator kinerja 2. Kebijakan yang tidak tepat sasaran atau adanya kebijakan yang tumpang tindih antar OPD	Penilaan kinerja pemerintah daerah turun
informasi yang disajikan tidak relevan	12	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	materi publikasi yang disajikan tidak sesuai dengan standar publikasi media pemerintahan	terjadi misinformasi terhadap masyarakat yang menggunakan layanan media informasi
Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan	12	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Adanya pergantian admin penyusun RKO pada OPD Kab/Kota.	Pekerjaan tidak selesai dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan
Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid	16	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan	Analisis pengambilan keputusan/kebijakan menjadi tidak tepat

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Hilangnya dan atau rusaknya aset	12	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Ketidaksesuaian pencatatan dan pendokumentasian aset dengan kondisi fisik	aset daerah yang pencatatannya tidak sesuai, dapat digunakan untuk kepentingan pribadi
Biro APBJ				
realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa	20	Asisten Administrasi	Kurangnya pemahaman mengenai metode pemilihan pengadaan barang/jasa	Capaian ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) belum maksimal
1. Perencanaan pengadaan tidak matang 2. Data RUP tidak valid	16	Asisten Administrasi	- Pemahaman PA/KPA/PPK OPD yang belum seragam dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa - PA/KPA/PPK Kurang cermat dalam menetapkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)	- Menghambat pelaksanaan pengadaan barang jasa - berpotensi aduan
Biro ORGANISASI				
Konsep kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	12	Asisten Administrasi	Perubahan regulasi belum tersosialisasi	Pemberian TPP tidak tepat sasaran
Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	12	Asisten Administrasi	Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat	Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan
Proses pembangunan ZI tidak berjalan	12	Asisten Administrasi	Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI	Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik
RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan	12	Kepala Biro Organisasi	RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh	Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah	12	Kepala Biro Organisasi	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial perangkat daerah
Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur	12	Kepala Biro Organisasi	Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami	Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya
Pelayanan dan pelaksanaan tugas tidak seragam	12	Kepala Biro Organisasi	SOP tidak disusun secara lengkap dan sesuai	Kinerja organisasi tidak terstandarisasi
Pendampingan dan pelaksanaan analisis jabatan tidak dilakukan	12	Kepala Biro Organisasi	OPD tidak responsif	Penataan jabatan tidak sesuai kebutuhan
SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan	12	Kepala Biro Organisasi	Kurangnya koordinasi antar OPD	Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi
TND tidak dilaksanakan secara seragam	12	Kepala Biro Organisasi	Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi TND	Administrasi pemerintahan tidak tertib
Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan	12	Kepala Biro Organisasi	Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov	Disparitas kualitas pelayanan antar daerah
Barang digunakan tanpa izin untuk keperluan di luar instansi	12	Kepala Biro Organisasi	Penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial dan penyalahgunaan aset daerah
Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki	12	Kepala Biro Organisasi	Pemalsuan laporan pemeliharaan barang	Kerugian keuangan
Biro Umum				
Terjadinya kerusakan BMD	12	Kepala Biro Umum	Kelalaian pengguna BMD	Menghambat kegiatan operasional

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama								
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	MoU tidak terlaksana	12	Tidak sinkronnya tujuan antar Pemerintah Provinsi daerah dengan Pemerntahan Luar daerah	Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.	1. Pembahasan perencaaan kerja sama yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan para pihak	Asisten Pemerintahan dan Kesejahateraan Rakyat	Triwulan II
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	16	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi	Tertundanya penetapan lokasi pembangunan	1. Perubahan trase/desain	Asisten Pemerintahan dan Kesejahateraan Rakyat	Triwulan IV
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Gagal tercapainya kesepakatan batas	16	Perbedaan persepsi atau kepentingan antar daerah	Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah	1.Melakukan Delineasi/koreksi garis batas daerah 2. Fasilitasi penyelesaian sengketa garis batas daeah antar Kab/kota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahateraan Rakyat	Triwulan IV
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Terlambatnya penyusunan atau revisi naskah kerja sama	12	Kurangnya komitmen dari anggota tim terhadap usulan kerjasama	Gagalnya inisiasi kerja sama dan menurunnya kepercayaan pihak luar negeri terhadap Jawa Tengah	1. Musyawarah dengan para pihak perihal permasalahan substansi kerjasama	Kepala Biro Pemerintahan Otda	Triwulan III
Biro Hukum								
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegagalan dalam fasilitasi penyelesaian perkara di pengadilan karena kelemahan dalam pembuktian	10	Kelemahan pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan	Potensi pengeluaran keuangan atau aset daerah karena putusan Pengadilan akibat kelemahan dalam pembuktian	- Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah - Meningkatkan kapasitas SDM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahateraan Rakyat	Triwulan IV

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	Kesalahan atau penundaan kegiatan	10	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran	- menyusun SOP Surat Masuk dan Surat Keluar -penggunaan aplikasi persuratan dengan baik dan benar	Kepala Biro Hukum	Triwulan I
Biro BUMD								
Program Perekonomian Pembangunan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	Laporan kinerja tidak valid	10	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat	Monitoring ke BUMD terkait	Kepala Biro BUMD	November 2026
Program Perekonomian Pembangunan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	Pemerintah Provinsi mendapatkan dividen yang lebih rendah dari periode sebelumnya	12	Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)	Berpengaruh terhadap penerimaan PAD	Monitoring dan Evaluasi kinerja diluar evaluasi triwulanan BUMD	Kepala Biro BUMD	TW I, II, III, dam IV
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Keterlambatan Pengumpulan Laporan	10	Laporan dari unit-unit di bawah BLUD (misal: poliklinik, instalasi rawat inap) tidak dikirim tepat waktu	Monev tidak dapat dilakukan sesuai jadwal triwulanan	Membuat surat tentang batas pengumpulan laporan	Kepala Biro BUMD	- TW I (Januari); - TW II (April); - TW III (Juli); - TW IV (Oktober)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD	10	Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD	Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditola	Bentuk tim khusus dengan perwakilan dari semua unit terkait	Kepala Biro BUMD	- TW I (Januari); - TW II (April); - TW III (Juli); - TW IV (Oktober)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	10	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi	Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah	Desk tindaklanjut atas rekomendasi evaluasi Kinerja triwulanan BUMD Jasa Keuangan	Kepala Biro BUMD	- TW I (Januari); - TW II (April); - TW III (Juli); - TW IV (Oktober)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	10	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Keuangan	Kinerja BUMD Keuangan tidak bertambah baik	Desk tindaklanjut atas rekomendasi evaluasi Kinerja triwulanan BUMD Jasa Keuangan	Kepala Biro BUMD	- TW I (Januari); - TW II (April); - TW III (Juli); - TW IV (Oktober)
Biro Perekonomian								
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Hasil keputusan rakor tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi	12	Instansi memiliki Program Prioritas yang Berbeda	potensi penyimpangan atau kegagalan program tidak terdeteksi dini	Monev pelaksanaan hasil rekomendasi	Asisten Perekonomian	- TW II (Mei) - TW IV (Nopember)
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan masih parsial	12	Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika regulasi	Rekomendasi kebijakan belum mendorong ketahanan pangan di Jawa Tengah	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Asisten Perekonomian	- Triwulan I (Januari) - Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan II (April - Juni)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Program Perekonomian Pembangunan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi Sumber Daya Mineral menjadi parsial	12	Tidak ada integrasi data Monev antar OPD	Rekomendasi tidak relevan	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral - Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari) - Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan II (April - Juni)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rekomendasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian menjadi parsial	12	Pengembangan geopark tidak menjadi prioritas kegiatan.	rendahnya tingkat kunjungan wisatawan dan perekonomian wilayah sekitar geopark	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian - Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari) - Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan II (April - Juni)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Reputasi geopark menurun	12	evaluasi atas efektivitas hasil fasilitasi tidak mencakup seluruh objek yang diberikan fasilitas	tidak ada pengembangan low carbon rice dan suistainable food	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Bidang Energi Sumber Daya Mineral yang melibatkan stakeholder mitra	Kepala Biro Perekonomian	Triwulan II
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pelaku usaha mengalami kendala dalam pengembangan Low Carbon Rice dan Sustainable Food	12	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka fasilitasi pengembangan Low Carbon Rice dan Sustainable Food yang melibatkan stakeholder mitra	Kepala Biro Perekonomian	Triwulan III
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Penurunan fungsi DAS di Jawa Tengah	12	Kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) menurun	Kerugian ekonomi masyarakat dan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) - Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan III (Juli - Agustus)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Munculnya pola pengelolaan mangrove yang terpaku pada satu sektor	12	Pengelolaan mangrove terpisah-pisah	Ekosistem mangrove tidak dapat hidup dengan optimal	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi dan koordinasi program oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah - Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi dan koordinasi program oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan II (April - Juni) - Triwulan III (Juli - Agustus)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral	Pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan rencana/target	12	Menurunnya potensi manajemen energi pada sektor pemanfaatan energi	Output dari kegiatan manajemen energi tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah pada sektor pemanfaatan energi - Mengadakan monitoring dalam rangka pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah pada sektor pemanfaatan energi	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan II (April - Juni) - Triwulan III (Juli - Agustus)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	data kebutuhan pupuk bersubsidi tidak sesuai	12	Penyaluran pupuk bersubsidi terhambat	pupuk tidak tersalurkan secara merata dan tepat sasaran	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi - Mengadakan monitoring dan kunjungan lapangan dalam rangka fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan II (April - Juni)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Rendahnya kualitas garam rakyat dan penurunan produktivitas dan hasil panen	12	Produksi garam dan hasil budidaya perikanan darat/tambak mengalami penurunan	- Garam rakyat tidak terserap oleh Industri secara maksimal - Kerugian finansial bagi pembudidaya	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka koordinasi kegiatan pengendalian harga garam rakyat dan pemanfaatan lahan budidaya perikanan darat/tambak di Jawa Tengah - Mengadakan monitoring dalam rangka koordinasi kegiatan pengendalian harga garam rakyat dan pemanfaatan lahan budidaya perikanan darat/tambak di Jawa Tengah	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan II (April - Juni)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tidak sesuainya kuota/alokasi BBM subsidi untuk nelayan	12	Masih banyak kapal perikanan yang belum terdata	Nelayan kesulitan mendapatkan BBM pada saat akan melaut	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka koordinasi kegiatan penyaluran BBM Subsidi dan BBM Industri untuk Kapal Perikanan - Mengadakan monitoring dalam rangka koordinasi kegiatan penyaluran BBM Subsidi dan BBM Industri untuk Kapal Perikanan	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan III (Juli - Agustus)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan	Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal	12	Adanya lahan produktif yang tidak digunakan masyarakat untuk budidaya bahan baku pangan lokal	1. Bahan Baku pangan local sangat terbatas 2. Kesulitan mendapatkan pelaku usaha pangan lokal	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal - Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan II (April - Juni)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan	Rendahnya penerapan fortifikasi beras	12	Perencanaan berbasis data yang lemah	Fortifikasi bisa berjalan tanpa sasaran yang tepat (miskin data) dan tidak efektif menyasar kelompok membutuhkan	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi penerapan fortifikasi beras - Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi penerapan fortifikasi beras	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan II (April - Juni) - Triwulan III (Juli - Agustus)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Kesenjangan penyebaran informasi dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait DBHCHT	12	Keterbatasan data yang dimiliki Kab/Kota	tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan memberikan rekomendasi/solusi	- Memfasilitasi penyusunan bahan laporan semester dan laporan akhir kegiatan DBHCHT - Menyelenggarakan asistensi penyusunan RKA/RKP perubahan kegiatan DBHCHT - Menyusun bahan fasilitasi dan asistensi pelaksanaan DBHCHT Kab/Kota	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan IV (Oktober - Desember)
Biro Administrasi Pembangunan								
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah atau program strategis tidak tercapai	12	1. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD kurang mendukung dalam upaya pencapaian indikator kinerja 2. Kebijakan yang tidak tepat sasaran atau adanya kebijakan yang tumpang tindih antar OPD	Penilaan kinerja pemerintah daerah turun	Menyusun rekomendasi hasil koordinasi dan pengendalian	Asisten Perekonomian	Triwulan III

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	informasi yang disajikan tidak relevan	12	materi publikasi yang disajikan tidak sesuai dengan standar publikasi media pemerintahan	terjadi misinformasi terhadap masyarakat yang menggunakan layanan media informasi	1. Monev rutin media informasi digital 2. pembuatan SOP publikasi media informasi digital 3. Pembuatan konten yang sesuai dengan selera masyarakat	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Triwulan II
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan	12	Adanya pergantian admin penyusun RKO pada OPD Kab/Kota.	Pekerjaan tidak selesai dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan	Pemantauan progres verifikasi RKO pada APBD Perubahan TA. 2026	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Triwulan IV
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid	16	Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan	Analisis pengambilan keputusan/kebijakan menjadi tidak tepat	Melakukan pencermatan progres pelaporan pada aplikasi bantuan keuangan kepada desa. Desa mana yang belum sama sekali melaporkan, dilakukan monitoring dan evaluasi dengan mendatangi ke kantor desa tersebut dan dilakukan uji sampel ke lokasi kegiatan.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Triwulan III
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Hilangnya dan atau rusaknya aset	12	Ketidaksesuaian pencatatan dan pendokumentasian aset dengan kondisi fisik	aset daerah yang pencatatannya tidak sesuai, dapat digunakan untuk kepentingan pribadi	1. Rekon Aset Biro Bangda 2. Update KIB internal Biro Bangda	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Triwulan II
Biro APBJ								

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa	20	Kurangnya pemahaman mengenai metode pemilihan pengadaan barang/jasa	Capaian ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) belum maksimal	1. Melaksanakan Monev PBJ meliputi review RUP, pendampingan RUP dan Sosialisasi peraturan PBJ anggaran murni. 2. Melaksanakan Monev PBJ meliputi review RUP, pendampingan RUP dan Sosialisasi peraturan PBJ anggaran perubahan.	Kepala Biro PBJ /Asisten Administrasi	1. TW I (Maret 2026) 2. TW III (September 2026)
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	1. Perencanaan pengadaan tidak matang 2. Data RUP tidak valid	16	- Pemahaman PA/KPA/PPK OPD yang belum seragam dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa - PA/KPA/PPK Kurang cermat dalam menetapkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)	- Menghambat pelaksanaan pengadaan barang jasa - berpotensi aduan	1. Sosialisasi Buku Saku Perencanaan PBJ 2. Penerapan Kertas Kerja Perencanaan Pengadaan Barang Jasa sampai dengan Pelaksanaan PBJ	Kepala Biro APBJ Setda Prov Jateng	1. TW I Tahun 2026 2. TW II Tahun 2026
Biro Organisasi								
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Konsep kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	12	Perubahan regulasi belum tersosialisasi	Pemberian TPP tidak tepat sasaran	Penyusunan konsep TPP berbasis murni kelas jabatan, evidence sesuai yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dan dinamika manajemen kepegawaian dengan berpedoman terhadap ketersediaan anggaran Daerah	Asisten Administrasi	Triwulan III s.d IV
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	12	Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat	Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan	Melaksanakan rakor/sosialisasi regulasi kelembagaan	Asisten Administrasi	Triwulan I

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Proses pembangunan ZI tidak berjalan	12	Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI	Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik	Sosialisasi dan Pencanangan pembangunan ZI kepada seluruh OPD	Asisten Administrasi	Triwulan IV
Program Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan	12	RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh	Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan	Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi OPD	Kepala Biro Organisasi	Triwulan IV
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah	12	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial perangkat daerah	Aturan peminjaman/penggunaan barang melalui izin tertulis.	Kepala Biro Organisasi	Triwulan I
Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur	12	Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami	Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya	Fasilitasi penerapan sistem kerja (pembuatan SK Kelompok Kerja dan penyesuaian proses bisnis dan SOP)	Kepala Biro Organisasi	Triwulan I
Program Penataan Organisasi	Jumlah UPT yang memperoleh nilai IPP Mandiri A - (Sangat Baik) dan A (Prima) dibagi jumlah UPT dikali 100 %	Pelayanan dan pelaksanaan tugas tidak seragam	12	SOP tidak disusun secara lengkap dan sesuai	Kinerja organisasi tidak terstandarisasi	Monitoring dan evaluasi SOP	Kepala Biro Organisasi	Triwulan III
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Pendampingan dan pelaksanaan analisis jabatan tidak dilakukan	12	OPD tidak responsif	Penataan jabatan tidak sesuai kebutuhan	Pendampingan analisis jabatan OPD dan Kab/Kota	Kepala Biro Organisasi	Triwulan III (Juli - September)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan	12	Kurangnya koordinasi antar OPD	Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi	Mempedomani SKJ sesuai peraturan yang telah ditetapkan yaitu untuk SKJ manajerial sesuai KepmenpanRB 409/2020, SKJ Jabatan Pelaksana sesuai KepmenpanRB nomor 01/2025, dan SKJ Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Instansi Teknis JF terkait	Kepala Biro Organisasi	Triwulan I
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	TND tidak dilaksanakan secara seragam	12	Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi TND	Administrasi pemerintahan tidak tertib	Monitoring dan evaluasi TND	Kepala Biro Organisasi	Triwulan I
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan	12	Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov	Disparitas kualitas pelayanan antar daerah	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota	Kepala Biro Organisasi	Triwulan IV
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Barang digunakan tanpa izin untuk keperluan di luar instansi	12	Penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial dan penyalahgunaan aset daerah	Aturan peminjaman/penggunaan barang melalui izin tertulis.	Kepala Biro Organisasi	Triwulan I
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki	12	Pemalsuan laporan pemeliharaan barang	Kerugian keuangan	Tanda tangan pejabat berwenang pada berita acara perbaikan.	Kepala Biro Organisasi	Triwulan I
Biro Umum								

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Prgram Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	Terjadinya kerusakan BMD	12	Kelalaian pengguna BMD	Menghambat kegiatan operasional	Memberikan bukti surat izin penggunaan kendaraan bermotor	Kepala Biro Umum	Semester I dan Semester II Tahun 2026

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembentukan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tugas Sekretariat DPRD adalah membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan DPRD Provinsi, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tiga fungsi yaitu Fungsi Legislasi dalam membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Fungsi kedua adalah Fungsi Anggaran yaitu membahas dan menyetujui APBD dan yang terakhir Fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan yang didalamnya juga mencakup perencanaan penganggaran responsif gender, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029. Menindaklanjuti hal tersebut, agar pembangunan terus berjalan maka perangkat daerah perlu menyusun dokumen RENSTRA yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) pada tingkat daerah provinsi, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1.2.

Pengertian RPJMD

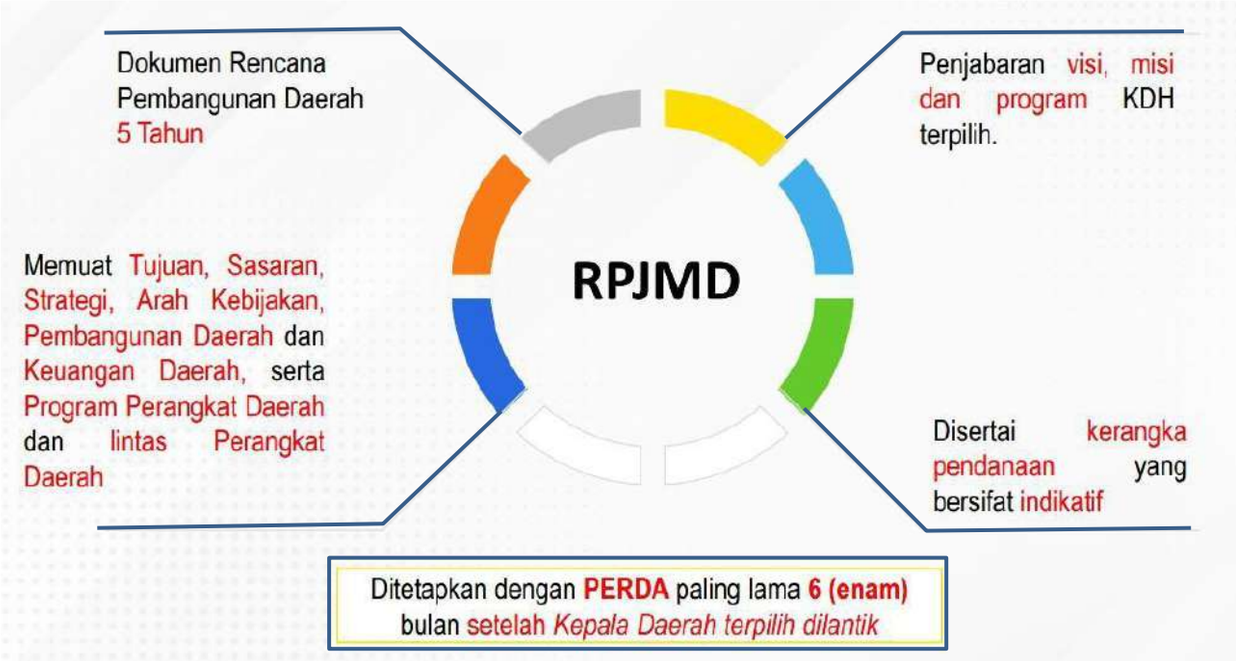

Sumber : Sosialisasi Inmendagri 2 Tahun 2025 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Sejalan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 maka Perangkat Daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 hal ini juga memenuhi arahan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7.2.2/0002764 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah hingga kab/kota dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.3 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

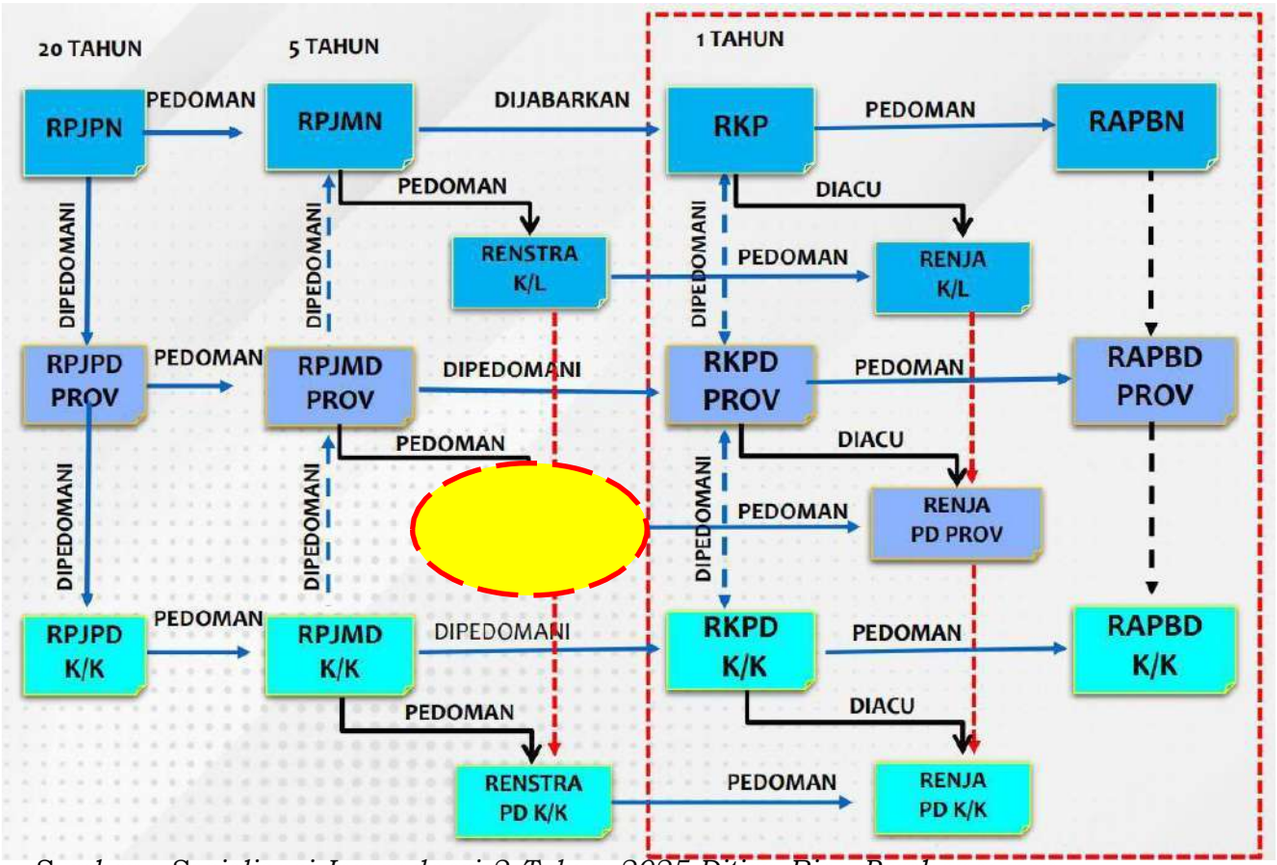

Sumber : Sosialisasi Inmendagri 2 Tahun 2025 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Renstra Sekretariat DPRD tidak ada keterkaitan dengan RENSTRA K/L, dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mempedomani pada dokumen RPJPN, RPJPD dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029. Kebijakan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada tujuan "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045" yang dapat dijabarkan :

1. Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kotributor perekonomian nasional yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman, dan

Responsif terhadap Lingkungan serta sebagai episentrum lumbung pangan, industri nasional dan magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Nusantara.

2. Melanjutkan dan Meningkatkan Pembangunan Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik, melakukan Integrasi Program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, serta melakukan Kolaborasi pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.
3. Kontribusi Provinsi Jawa Tengah sebagai Episentrum Pembangunan

Sumber Daya Manusia Nasional menuju bonus demografi pada tahun
2045, yang menjadi sumber inspirasi bagi dunia dengan generasi yang cerdas serta Ekonomi yang tumbuh berkembang.

Gambar 1.3. Tahapan / Alur Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025– 2029

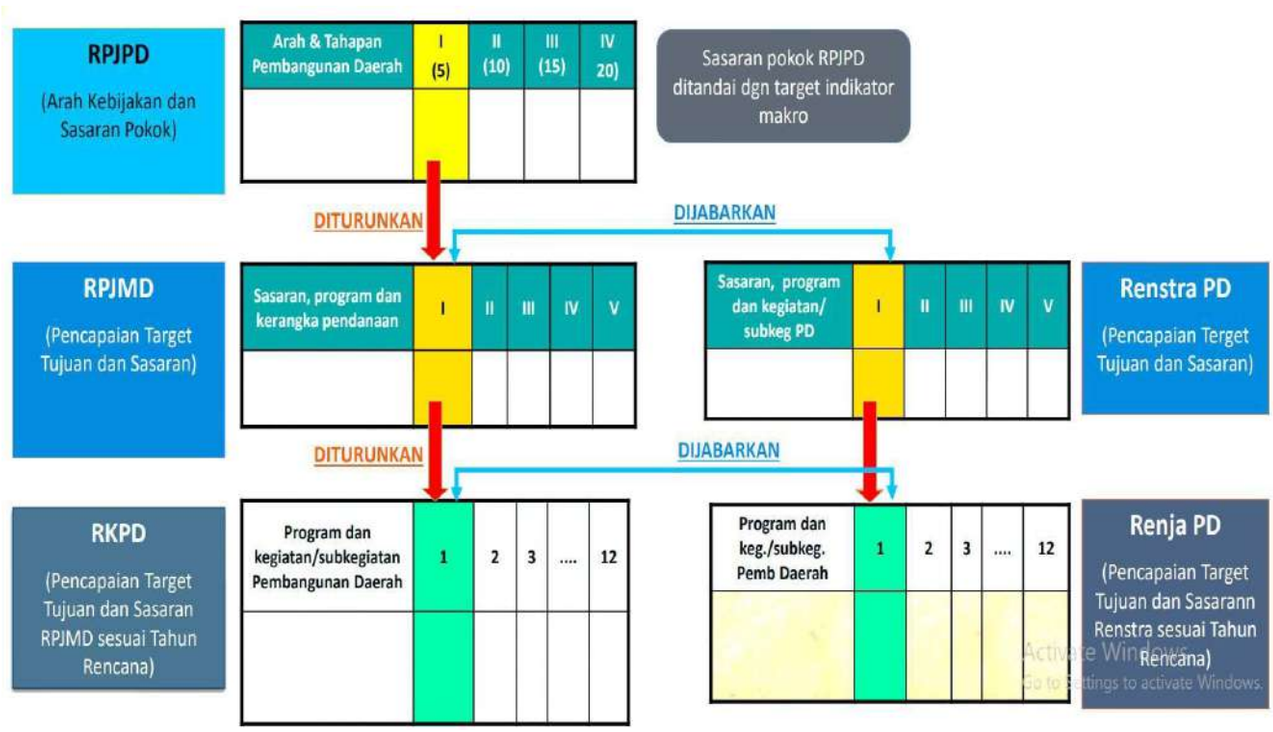

Sumber : Sosialisasi Inmendagri 2 Tahun 2025 Ditjen Bina PembangunanDaerah Kementerian Dalam Negeri

Penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait tahapan/alur penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029,

penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berjenjang, terpadu, dan berorientasi pada pencapaian tujuan strategis pembangunan. Proses ini mengikuti alur dokumen perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam regulasi nasional dan daerah, dengan mengacu pada arahan dan tahapan pembangunan jangka panjang dan menengah. Renstra PD (Perangkat Daerah) disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), serta merupakan dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD). Secara hierarkis, proses penyusunan Renstra PD dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RPJPD ditandai dengan target-target indikator makro yang menggambarkan arah pembangunan secara menyeluruh. Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, RPJPD menjadi dasar penjabaran visi pembangunan yang akan dicapai pada periode-periode tertentu (tahapan I, II, III, IV), termasuk periode 2025–2029 yang berada dalam tahapan keempat pembangunan jangka panjang (tahun ke-20).

Dari RPJPD, kemudian diturunkan ke dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka menengah selama lima tahun. RPJMD menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih, serta memuat kerangka pendanaan dan indikator kinerja utama yang akan dicapai selama satu periode pemerintahan. Pada tahap ini, Renstra Sekretariat DPRD mengambil peran strategis dengan menyusun sasaran, program, dan kegiatan yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMD.

Renstra PD kemudian disusun dengan menjabarkan lebih rinci target-target RPJMD ke dalam dokumen sektoral masing-masing perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD. Dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan kelembagaan dalam lima tahun ke depan, mencakup strategi, kebijakan, program, serta indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan (IKU dan IKK) yang terukur. Proses penyusunan Renstra PD dilakukan melalui pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, serta berdasarkan kajian evaluatif atas capaian kinerja periode sebelumnya (Bappenas, 2024).

Selanjutnya, Renstra PD dijabarkan secara tahunan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merinci program dan kegiatan/subkegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Renja PD akan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen rencana tahunan pemerintah provinsi secara menyeluruh. Proses ini memastikan bahwa seluruh kegiatan perangkat daerah memiliki arah yang konsisten terhadap tujuan pembangunan jangka menengah.

Sebagai lembaga sekretariat yang mendukung fungsi kelembagaan DPRD, Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029 juga mencakup strategi penguatan kapasitas kelembagaan, pelayanan

administrasi, fasilitasi rapat-rapat, serta pengelolaan komunikasi informasi publik DPRD. Hal ini tidak hanya berfokus pada urusan teknis administratif, tetapi juga mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan oleh DPRD (Kemendagri, 2024).

Penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, penyelarasan dengan dokumen RPJMD, serta finalisasi dan penetapan melalui keputusan kepala perangkat daerah. Rancangan awal disusun berdasarkan evaluasi kinerja lima tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang. Konsultasi publik melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan. Selanjutnya, rancangan Renstra disesuaikan dengan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan, baik dari sisi indikator kinerja, kerangka regulasi, maupun alokasi sumber daya.

Dengan demikian, Renstra Sekretariat DPRD 2025–2029 akan menjadi dokumen strategis yang tidak hanya menjabarkan program- program rutin, tetapi juga memuat agenda transformasi kelembagaan untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan responsif. Dokumen ini menjadi acuan dalam menyusun Renja PD tahunan dan Rencana Kinerja (Renkin), serta mendasari pengukuran kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (LAN, 2024).

Dengan struktur perencanaan yang terpadu dan konsisten antar dokumen, penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 memastikan bahwa kegiatan kelembagaan DPRD berada dalam kerangka pembangunan daerah yang strategis, sinergis, dan berorientasi hasil. Hal ini sejalan dengan prinsip integrasi perencanaan dan penganggaran dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Jika dilihat lebih lanjut dalam Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 maka telah dirumuskan juga keterkaitan antara indikator daerah dan perangkat daerah dimana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah akan mendukung misi ke tiga yakni terkait dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas dimana tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada Meningkatnya Pelayanan Kedewanan dengan indikator Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD dan Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 8 Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

25. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

26. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7.2.2/0002764 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029.

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang tersusun secara sistematis, terarah, dan selaras dengan tujuan strategis pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029. Dengan harapan dokumen Renstra ini menjadi pedoman utama bagi Sekretariat DPRD dalam merancang kebijakan operasional kelembagaan, memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD, serta mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.

Tujuan dari penyusunan Renstra adalah untuk mewujudkan kinerja kelembagaan yang terukur dan berorientasi hasil, melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi rujukan teknokratis dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong keterpaduan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan arahan nasional, tujuan dari penyusunan Renstra dapat kami jabarkan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 2025- 2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 2025-2029.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Bab ini berisi gambaran tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta permasalahan pelayanan dan isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, dengan indikator kinerja serta target selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran didapatkan dari kertas kerja cascading perangkat daerah yang telah disusun berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, telaahan Renstra Kementerian/ lembaga, dan Penentuan Isu-isu Strategis serta Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tegah.

BAB VI Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi rencana program, kegiatan sub kegiatan, disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB V Penutup

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut dan kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Pembentukan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pimpinan tertinggi di lembaga Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dijabat seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Persidangan, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kepala Bagian Keuangan, serta Kepala Sub Bagian yang berada dibawah Kepala Bagian. Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi, antara lain:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah;
c. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi Jawa Tengah;
d. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai struktur organisasi terdiri dari:

a. Sekretariat DPRD
   merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
b. Bagian Umum
   mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan adrninistrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD di bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapa, membawahi:

   - Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
     mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan adrninistrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha dan kepegawaian.

   - Subbagian Rumah Tangga
     mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rumah tangga.

   - Subbagian Perlengkapan
     pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlengkapan.

c. Bagian Keuangan
   mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan

tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD , evaluasi dan pelaporan di bidang rencana program, monitoring dan evaluasi, perbendaharaan, akuntansi, membawahi :

- Subbagian Rencana Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana program, monitoring dan evaluasi.
- Subbagian Perbendaharaan
  mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana program, monitoring dan evaluai.
- Subbagian Akuntansi
  mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi.

d. Bagian Persidangan
mempunyai tugas melaksanakan melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan rapat dan risalah, alat kelengkapan Dewan, dan perundang-undangan dan pengkajian, membawahi :

- Subbagian Rapat dan Risalah
  mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rapat dan risalah.
- Subbagian Alat Kelengkapan Dewan
  mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kelengkapan Dewan.
- Subbagian Perundang undangan dan Pengkajian
  mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perundang- undangan dan pengkajian.

e. Bagian Humas
mempunyai tugas, melaksanakan melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi, informasi dan dokumentasi serta protoko, membawahi:

- Subbagian Publikasi
  mempunyai tugas, melakukan penyiapan bah an pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi.
- Subbagian Informasi dan Dokumentasi
  mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan dokumentasi.
- Subbagiaan Protokol
  Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang protokol.

f. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Sesuai berita acara hasil desk penyusunan Rapergub struktur organisasi dan tata kerja OPD tahun 2025 bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak ada perubahan nomenklatur pada bagian serta nomenklatur pada OPD. Selengkapnya Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tersaji pada gambar berikut:

Gambar

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

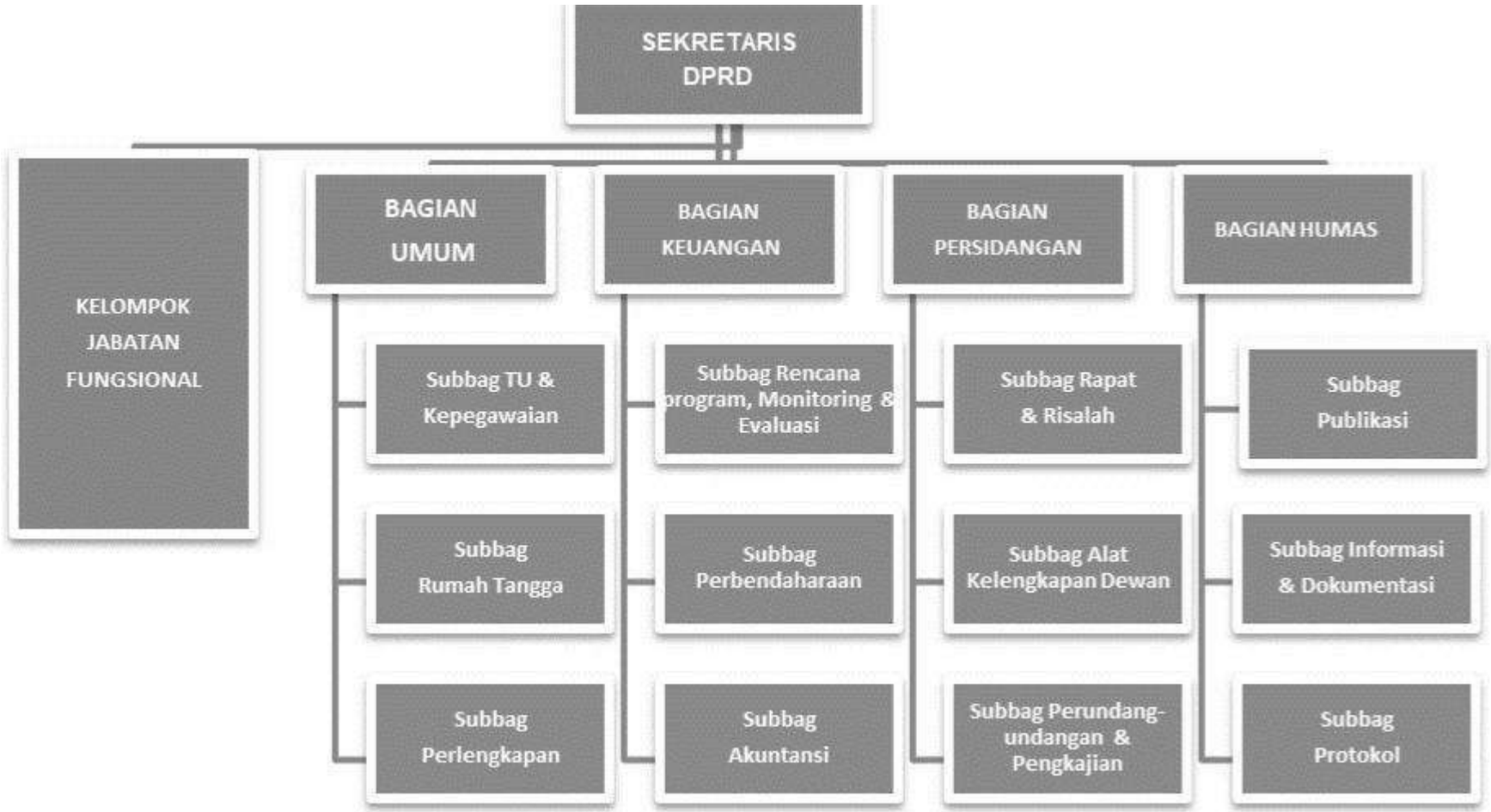

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator yang mendukung keberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber daya Aparatur, yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS. Adapun susunan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut :

Tabel

Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PNS	77	35
2	P3K	5	5
JUMLAH ASN		**82**	**40**

Tabel
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Umur
Tahun 2025

NO	PEGAWAI	10-30 TAHUN	31-45 TAHUN	46-55 TAHUN	>55 TAHUN
1	PNS	8	31	49	24
2	P3K	1	5	4	0
TOTAL		**9**	**36**	**53**	**24**
JUMLAH ASN		**122**			

Tabel
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Jabatan
Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Struktural	9 Orang
2	Jabatan Fungsional	6 Orang
3	Jabatan Pelaksana	107 Orang
JUMLAH		**122 Orang**

2.2.2 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimana Sarana dan prasarana serta Aset yang tersedia di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel

Jumlah Aset Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

NO	URAIAN	JUMLAH
1	**ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR**	**105**
	kendaraan dinas bermotor perorangan	17
	kendaraan bermotor penumpang	51
	kendaraan bermotor angkutan barang	2
	kendaraan bermotor beroda dua	30
	kendaraan tak bermotor angkutan barang	5
2	**ALAT KANTOR**	**938**
	mesin ketik	38
	mesin hitung/mesin jumlah	44
	alat reproduksi (penggandaan)	25
	alat penyimpan perlengkapan kantor	472
	alat kantor lainnya	359
3	**ALAT RUMAH TANGGA**	**7.824**
	meubelair	4.659
	alat pengukur waktu	37
	alat pembersih	45
	alat pendingin	611
	alat dapur	59

	alat rumah tangga lainnya (home use)	2.392
	alat pemadam kebakaran	21
4	**MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT**	**1.241**
	meja kerja pejabat	138
	meja rapat pejabat	146
	kursi kerja pejabat	299
	kursi rapat pejabat	169
	kursi hadap depan meja kerja pejabat	313
	lemari dan arsip pejabat	176
5	**ALAT STUDIO**	**254**
	peralatan studio audio	153
	peralatan studio video dan film	99
	alat studio lainnya	2
6	**ALAT KOMUNIKASI**	**159**
	alat komunikasi telephone	156
	alat komunikasi sosial	3
7	**ALAT KEDOKTERAN**	**10**
	alat kedokteran umum	9
	alat kedokteran bedah	1
8	**ALAT KESEHATAN UMUM**	**23**
	alat kesehatan olah raga	23
9	**KOMPUTER UNIT**	**754**
	komputer jaringan	4
	personal komputer	750
10	**PERALATAN KOMPUTER**	**664**
	peralatan mini komputer	12
	peralatan personal komputer	635
	peralatan jaringan	17
11	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA**	**28**
	bangunan gedung kantor	3
	bangunan gudang	3
	bangunan gedung tempat ibadah	2
	bangunan gedung tempat pertemuan	4
	bangunan gedung tempat olah raga	1
	bangunan gedung untuk pos jaga	7
	bangunan gedung garasi/pool	2
	bangunan terbuka	1
	bangunan fasilitas umum	1
	taman	3
	bangunan gedung tempat kerja lainnya	1
12	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL**	**7**
	rumah negara golongan 1	1

	mess/wisma/ tempat peristirahatan	6
13	**MONUMEN**	**156**
	tugu	148
	tugu/Tanda Batas Administrasi	3
	Pagar	5
14	**TANAH**	**5**
	tanah bangunan perumahan/G. tempat tinggal	5
15	**JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI**	**16**
	jalan khusus	1
	bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai	3
	bangunan pengambilan pengembangan sumber air	6
	Bangunan pembawa air bersih/air beku	5
	Instalasi pembangkit listrik tenaga surya (Plts)	1
16	**ASET TETAP LAINNYA**	**1.811**
	buku umum	1.348
	buku agama	69
	buku ilmu sosial	343
	buku ilmu pengetahuan praktis	47
	buku arsitektur, kesenian, olah raga	2
	buku geografi, biografi, sejarah	2
17	**BARANG BERCORAK KESENIAN KEBUDAYAAN / OLAHRAGA**	**242**
	lukisan	9
	alat peraga kesenian	10
	maket, miniatur, replika, foto dokumen dan benda bersejarah	1
	alat bercorak kebudayaan lainnya	222
18	**PERALATAN OLAH RAGA**	**1**
	peralatan senam	1
19	**RAMBU-RAMBU**	**3**
	Rambu tidak bersuar	3
20	**ALAT LABORATORIUM**	**1**
	photo dan film equipment	1
21	**PERALATAN PEMANCAR**	**82**
	peralatan antena Uhf	10
	peralatan antena Shf/Parabola	70
	program input equipment	1
	peralatan antena penerima Vhf	1
22	**PERALATAN DAN MESIN**	**11**
	electric generating set	10
	pompa	1

2.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dilihat dari realisasi kinerja indikator dan anggaran sebagaimana termuat Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah periode sebelumnya yang masing masing dijelaskan sebagai berikut:

Dalam rangka mendukung kinerja DPRD Jawa Tengah sebagai lembaga yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas, Sekretariat DPRD memiliki posisi yang sangat penting dalam membantu DPRD melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai mitra sejajar kepala daerah, DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban tugas wewenang dan fungsi DPRD. Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 96 dan amanat Pasal 5; Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki 3 fungsi yakni: fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi penyusunan Anggaran dan fungsi Pengawasan.

Fungsi pembentukkan PERDA tidak hanya diukur dari kuantitas PERDA tapi juga kualitas PERDA apakah membawa kontribusi yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya fungsi anggaran yang dibentuk atas persetujuan bersama terhadap rancangan PERDA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan ke daerah. Fungsi ketiga yaitu fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, Sekretariat DPRD didukung oleh dua Program yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan perbaikan melalui serangkaian upaya terpadu di sektor birokrasi yang meliputi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas pelayanan kedewanan.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta kinerja

lembaga DPRD yang optimal, efektif dan tepat sasaran Sekretariat DPRD memiliki program/ kegiatan yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel

Pencapaian Kinerja Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	Tujuan PD																			
	Indeks Kepuasan Atas Kualitas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	persen				72	73	88,5	89	-	88,18	90,28	90,33	91,23	-	122,47	123,67	102,07	102,51	-
	Nilai Kepuasan Masyarakat	angka				72	73	74	75	-	71,07	85,37	87,75	89,75	-	100,09	116,95	118,58	119,67	-
2	Sasaran PD																			
	Indeks Kepuasan Atas Kualitas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	persen				72	73	-	-	-	88,18	90,28	-	-	-	122,47	123,67	-	-	-
	Persentase Ketercapaian Kinerja Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	persen				-	-	95	75	-	-	-	95	91,23	-	-	-	100	121,64	-
	Nilai Kepuasan Masyarakat	angka				72	73	74	75	-	71,07	85,37	87,75	89,75	-	100,09	116,94	118,58	119,67	-

	Nilai SAKIP PD	angka				65	67	68	69	-	78,1	78,73	80,40	83,55	-	118,33	117,51	118,23	121,09	-
3	Program PD																			
	Persentase layanan bagian persidangan	persen				-	95	-	-	-	-	95	-	-	-	-	100	-	-	-
	Persentase Fasilitasi Penyusunan Raperda	persen				-	-	95	95		-	-	95	95	-	-	-	100	100	-
	Persentase layanan bagian humas	persen				-	95	95	95	-	-	95	95	95	-	-	100	100	100	-
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	persen				-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-
	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	persen				-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
B	**Renstra PD Tahun 2024-2026**																			
1	Tujuan PD																			
	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	angka				-	-	-	-	90	-	-	-	-	91,68	-	-	-	-	101,87
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	angka				-	-	-	-	70	-	-	-	-	71,99	-	-	-	-	102,84
2	Sasaran PD																			
	Indeks Kemudahan Prosedur Pelayanan Di Sekretariat DPRD	persen				-	-	-	-	75	-	-	-	-	76,87	-	-	-	-	102,49
	Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana (Survei Kepuasan DPRD)	persen				-	-	-	-	75	-	-	-	-	75	-	-	-	-	100

	Indeks Manajemen Risiko	angka				-	-	-	-	2,75	-	-	-	-	2,83	-	-	-	-	102,91
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka				-	-	-	-	76	-	-	-	-	90,25	-	-	-	-	118,75
3	Program PD																			
	Persentase Layanan Bagian Humas	persen				-	-	-	-	95	-	-	-	-	95	-	-	-	-	100
	Persentase Fasilitasi Penyusunan Raperda	persen				-	-	-	-	95	-	-	-	-	95	-	-	-	-	100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	persen				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	persen				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

Pada Renstra Tahun 2018 – 2023 di tahun 2023 realisasi kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mampu melampaui target yang ditetapkan, baik target pada tahun 2023 maupun target RPJMD. Berdasarkan tabel skala capaian kinerja, bahwa capaian realisasi kinerja yang lebih dari 100%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian tujuan dan sasaran pada tahun 2023 untuk tujuan I (pertama) yaitu Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Atas Kualitas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan target 89 tercapai realisasi sebesar 102,51%. Tingginya capaian ini dikarenakan tingginya tingkat kepuasan anggota DPRD atas pelayanan Sekretariat DPRD, Kegiatan Survei Kepuasan atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang diikuti oleh 97 responden dimana survei ini terdiri dari 9 unsur penilaian. Pada unsur pelayanan mendapatkan nilai paling memuaskan yaitu dari segi kemampuan SDM dan efektivitas waktu dalam pelaksanaan pelayanan kedewanan, sehingga dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD mampu melayani anggota DPRD dengan baik dan memuaskan. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan pertama ini adalah Tercapainya Kinerja Layanan Pedukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan target 95% telah tercapai. Sasaran ini mendapatkan capaian 100% yang termasuk kategori BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam melayani dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sudah terlaksana dengan baik.

Pada Tujuan II (Kedua) Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat dengan indikator kinerja daerah Nilai Kepuasan Masyarakat dengan target 75 mampu mendapatkan realiasasi sebesar 89,75 dengan capaian 119,67%, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan Sekretariat DPRD, sehingga dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penilaian ini didapatkan dengan melakukan survei langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini ada 2 (dua) yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP PD dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat. Pada sasaran yang pertama nilai SAKIP PD terealisasi 83,55 dari target 69

sehingga capaian nya adalah 121,09%. Realisasi Nilai SAKIP PD melebihi target yang ditetapkan karena Sekretariat DPRD telah meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, baik perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penetapan perjanjian kinerja, serta meningkatkan kualitas evaluasi guna capaian kinerja yang lebih baik. Pada sasaran kedua dengan indikator kinerja daerah Nilai Kepuasan Masyarakat dengan target 75 mampu mendapatkan realiasasi sebesar 89,75 dengan capaian 119,67%, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan Sekretariat DPRD, sehingga dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Penilaian ini didapatkan dengan melakukan survei langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target fisik 100 % dilaksanakan melalui dua indikator program dengan tingkat ketercapaian 100%. Indikator yang terdapat pada program ini yaitu Indikator Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah dan indikator Persentase Ketercapaian Perencanaan dan evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD telah teralisasi 100% sesuai target dan tingkat ketercapaian kinerja sebesar 100% serta ketercapaian program terhadap RPJMD sebesar 100%. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga program ini telah terlaksana dengan maksimal. Manfaat penyelenggaraan Program ini adalah untuk terlaksana atau tersedianya dan terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi keuangan dan kesejahteraan DPRD serta perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan target 95% dilaksanakan melalui dua indikator program dengan tingkat ketercapaian tingkat ketercapaian tinggi 100%. Indikator yang terdapat pada program ini adalah Persentase Layanan Bagian Humas dan Indikator Persentase Fasilitasi Penyusunan Raperda. Indikator kinerja atas Indikator Persentase Layanan Bagian Humas telah terealisasi 95% sesuai target sehingga tingkat ketercapaian kinerja 100% atau sangat tinggi serta ketercapaian program terhadap RPJMD sebesar 100%. Sedangkan Indikator kinerja atas Indikator Persentase Fasilitasi Penyusunan Raperda telah terealisasi 95% sesuai target sehingga tingkat ketercapaian kinerja 100% atau sangat tinggi dan ketercapaian program

terhadap RPJMD sebesar 100%. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga program ini telah terlaksana dengan maksimal.

Capaian kinerja Renstra Tahun 2018-2023 pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perbaikan yang signifikan, terutama pada tujuan, sasaran dan program yang mampu mencapai 100% sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Walaupun sempat ada tantangan dalam pelaksanaan kegiatan DPRD di awal tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem administrasi, koordinasi yang lebih baik, dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor yang penting dalam peningkatan kinerja. Untuk Renstra RPD 2024 – 2026 di tujuan, sasaran dan program juga mampu mencapai 100%. Ini menunjukkan Sekretariat DPRD memiliki kinerja yang efektif untuk memberikan pelayanan kepada anggota DPRD dan ini perlu dipertahankan dan ditigkatkan lagi untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.

Tabel

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Pagu Indikatif RENSTRA PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp.000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan	686.550.000	1.550.000.000	1.550.000.000	1.677.500.000	1.750.000.000	686.550.000	1.550.000.000	1.550.000.000	1.677.500.000	1.750.000.000	683.750.000	709.280.000	837.650.000	924.900.000	878.060.000	99,59	45,76	54,04	55,13	50,17	212.690.000	38.862.000
2	Belanja																						
	Program Peningkatan Layanan Kedewanan (Bagian Persidangan)	84.941.221.000	90.152.019.000	97.471.815.000	103.512.459.000		181.419.120.000					134.269.008.488					74,01						
	Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah	25.058.451.000	25.684.913.000	26.327.036.000	26.985.212.000		24.102.635.000					15.863.150.866					65,81						
	Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan	41.486.302.000	42.523.459.000	43.586.546.000	44.676.212.000		92.403.633.000					63.288.636.196					68,49						
	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah	18.396.468.000	21.943.647.000	27.558.233.000	31.851.035.000		64.912.852.000					55.117.221.426					84,90						
	Program Peningkatan Layanan Kedewanan (Bagian Humas)	20.222.360.000	20.727.920.000	21.246.118.000	21.777.269.000		13.122.321.000					11.442.024.513					87,19						
	Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan	6.020.986.000	6.171.510.000	6.325.798.000	6.483.943.000		4.409.546.000					3.752.623.037					85,10						

	Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	11.891.513.000	12.188.800.000	12.493.522.000	12.805.859.000		7.093.720.000					6.592.792.726					92,93						
	Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD	2.309.861.000	2.367.610.000	2.426.797.000	2.487.467.000		1.619.055.000					1.096.608.750					67,73						
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	65.749.640.000	68.418.055.000	71.237.532.000	74.217.394.000		52.106.569.000					41.417.559.281					79,49						
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.029.666.000	1.081.150.000	1.135.20 7.000	1.191.96 7.000		699.155.000					678.060.700					96,98						
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	403.340.000	423.507.000	444.683.000	466.917.000		392.336.000					385.207.290					98,18						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik Perangkat Daerah	2.868.650.000	3.155.515.000	3.471.06 6.000	3.818.17 3.000		1.864.250.000					1.367.751.831					73,37						
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	660.000.000	726.000.000	798.600.000	878.460.000		801.203.000					636.597.102					79,46						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	5.077.003.000	5.330.853.000	5.756.54 6.000	6.044.37 3.000		5.304.483.000					5.151.255.710					97,11						
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	21.238.087.000	22.299.991.000	23.414.91.000	24.585.741.000		11.218.582.000					4.188.370.060					37,33						
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat	1.668.242.000	1.751.654.00	1.839.236.000	1.931.198.000		1.975.131.000					1.113.768.000					56,39						

	Perangkat Daerah		0																			
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	491.074.000	515.628.000	541.409.000	568.480.000		468.795.000					440.645.798					94,00						
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	2.853.900.000	2.996.595.000	3.146.424.000	3.303.745.000		2.120.772.000					2.015.508.740					95,04						
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	11.229.980.000	14.709.980.000	11.229.980.000	11.229.980.000		8.518.195.000					7.742.099.180					90,89						
	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	5.005.220.000	5.255.481.000	5.518.255.000	5.794.168.000		2.662.305.000					2.492.003.000					93,60						
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.900.000.000	3.900.000.000	3.900.000.000	3.900.000.000		7.708.068.000					7.592.000.000					98,49						
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	2.047.500.000	2.149.875.000	2.257.368.000	2.370.237.000		1.892.178.000					1.831.672.000					96,80						
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	694.674.000	729.408.000	765.878.000	804.172.000		99.560.000					46.590.000					46,80						
	Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD	780.000.000	780.000.000	780.000.000	780.000.000		778.084.000					724.010.050					93,05						
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	341.250.000	358.312.000	376.228.000	395.039.000		1.350.393.000					959.849.764					71,08						

	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD	2.280.141.000	2.394.148.000	2.513.855.000	2.639.548.000		1.440.710.000					1.390.610.698					96,52						
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	3.036.559.000	3.188.387.000	3.347.806.000	3.515.196.000		2.812.369.000					2.661.559.358					94,64						
	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	37.771.000.000	0	0	0																		
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.486.821.000	1.581.036.000	1.681.947.000	1.790.094.000		779.435.000					772.215.500					99,07						
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.089.344.000	1.143.811.000	1.201.002.000	1.261.052.000		575.814.000					570.240.100					99,03						
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	397.477,000	437.225.000	480.947.000	529.042.000		203.621.000					201.975.400					99,19						
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Bagian Persidangan							82.813.830.000					62.417.927.232					75,37					
	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD							20.182.275.000					8.116.809.580					40,22					
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah							20.182.275.000					8.116.809.580					40,22					
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran							468.908.000					422.759.850					90,16					

	Sub Kegiatan Pembahasan APBD							468.908.000					422.759.850					90,16					
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							8.907.148.000					7.616.452.469					85,51					
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum							1.597.906.000					1.400.346.250					87,63					
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur							1.569.972.000					1.402.368.714					89,32					
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat							1.551.877.000					1.231.221.500					79,33					
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian							1.419.985.000					1.297.540.750					91,37					
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam							1.598.418.000					1.596.083.750					99,85					
	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan							792.150.000					338.040.500					42,67					
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran							376.840.000					350.851.005					93,10					
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD							8.100.908.000					5.293.059.450					65,34					
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD							8.100.908.000					5.293.059.450					65,34					

	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							33.385.732.000				31.809.889.276					95,28					
	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah							14.192.315.000				12.999.395.446					91,59					
	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD							150.000.000				58.654.434					39,10					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses							19.043.417.000				18.751.839.396					98,46					
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							744.293.000				401.439.663					53,94					
	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD							744.293.000				401.439.663					53,94					
	Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD							11.024.556.000				8.757.516.944					79,44					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD							11.024.556.000				8.757.516.944					79,44					
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Bagian Humas							17.460.876.000				16.622.000.038					95,20					
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD							9.816.882.000				9.241.220.358					94,14					
	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli							2.085.000.000				1.891.010.000					90,69					

	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi							360.000.000					345.480.000					95,96					
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							5.358.616.000					5.120.473.383					95,55					
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD							2.013.266.000					1.884.256.975					93,59					
	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah							7.643.994.000					7.380.779.680					96,56					
	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi							7.643.994.000					7.380.779.680					96,56					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							30.327.369.000					27.839.921					91,80					
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							588.081.000					572.913.850					97,42					
	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan							313.072.000					304.961.700					97,41					
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah							227.459.000					223.693.150					98,34					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah							47.550.000					44.259.000					93,08					
	Kegiatan Administrasi Keuangan							842.700.000					819.460.900					97,24					

	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							842.700.000					819.460.900					97,24					
	Kegiatan Administrasi Keuangan							16.609.945.000					16.490.849.065					99,28					
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							16.609.945.000					16.490.849.065					99,28					
	Kegiatan Administrasi Umum							25.979.053.000					23.654.708.214					91,05					
	Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan							183.231.000					181.925.695					99,29					
	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN ke Luar Daerah							2.953.213.000					2.850.301.299					96,52					
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan							438.450.000					407.560.000					92,25					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS							785.000.000					648.479.844					82,61					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah							853.674.000					658.071.611					77,09					
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor							191.393.0					188.316.					98,39					

								00					950									
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							94.440.000					94.440.000					100				
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4.324.765.000					3.651.630.000					84,44				
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor							1.168.146.000					985.695.800					84,38				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional							3.366.716.000					3.257.746.560					96,76				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor							1.791.484.000					1.771.151.300					96,87				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur							47.846.000					44.996.000					94,04				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah							1.627.116.000					1.308.330.907					80,40				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Kantor							2.253.936.000					1.921.501.197					85,25				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							2.768.260.000					2.647.060.000					95,62				

	Sub Kegiatan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah							1.233.164.000					1.210.92 9.000					98,20					
	Sub Kegiatan Pemelliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas							200.000.000					197.321.000					98,66					
	Sub Kegiatan Pemelliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor							566.828.000					549.667.000					96,97					
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Knator							1.131.391.000					1.079.48 4.051					95,41					
	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							2.917.535.000					2.792.83 8.124					95,73					
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal							64.975.000					44.797.8 91					68,95					
	Sub Kegiatan Pengadaan Mesin / Kartu Absensi							1.472.560.000					1.446.74 0.733					98,25					
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya							1.380.000.000					1.301.29 9.500					94,30					
	Program Layanan dan Administrasi Keuangan							113.562.93 93.000					113.152.392.65					99,64					
	Kegiatan Layanan Keuangann dan Kesejahteraan DPRD							113.562.93 93.000					113.152.392.65					99,64					
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD							113.562.93 93.000					113.152.392.65					99,64					

	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					94.420.750.000			103.428.458.000	97.972.648.000	144.013.728.000			88.586.813.742	90.555.468.913	103.689.347.664			85,65	92,43	72,00		
	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					4.136.360.000			12.358.640.000	4.136.360.000	8.885.622.000			8.062.629.043	3.881.198.851	7.949.160.580			65,24	93,83	89,46		
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					4.136.360.000			12.358.640.000	4.136.360.000	8.885.622.000			8.062.629.043	3.881.198.851	7.949.160.580			65,24	93,83	89,46		
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran					1.618.590.000			705.694.000	1.618.590.000	3.011.090.000			686.594.819	1.583.573.080	2.901.151.260			97,29	97,84	96,35		
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD					1.618.590.000			705.694.000	1.618.590.000	3.011.090.000			686.594.819	1.583.573.080	2.901.151.260			97,29	97,84	96,35		
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					10.419.350.000			15.792.750.000	9.076.901.000	15.730.248.000			11.348.113.400	8.742.532.423	11.802.246.116			71,86	96,32	75,03		
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					1.676.640.000			2.850.880.000	1.539.075.000	2.445.139.000			2.146.851.000	1.443.752.475	1.672.982.700			75,30	93,81	68,42		
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					1.676.640.000			2.850.880.000	1.430.212.000	2.385.912.000			1.962.745.100	1.336.982.000	1.682.675.616			68,84	93,48	70,53		
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					1.676.640.000			2.850.880.000	1.422.462.000	2.438.803.000			1.951.354.450	1.405.423.540	1.875.233.			68,44	98,80	76,89		

						0										000						
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					1.676.640.000			2.850.880.000	1.507.998.000	2.444.448.000			1.912.785.800	1.455.047.375	1.698.287.500			67,09	96,49	69,48		
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					1.676.640.000			2.850.880.000	1.280.569.000	2.316.316.000			2.030.574.000	1.237.496.333	1.502.473.000			71,23	96,63	64,87		
	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					687.150.000			792.150.000	753.585.000	850.630.000			606.105.050	750.442.900	649.244.500			76,51	99,58	76,33		
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran					1.349.000.000			746.200.000	1.143.000.000	2.849.000.000			737.698.000	938.063.100	2.721.349.800			98,86	82,07	95,51		
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD					3.440.000.000			7.821.640.000	3.078.250.000	3.440.000.000			5.547.629.371	2.499.750.000	3.395.250.000			70,93	81,21	98,70		
	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD					3.440.000.000			7.821.640.000	3.078.250.000	3.440.000.000			5.547.629.371	2.499.750.000	3.395.250.000			70,93	81,21	98,70		
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					46.231.570.000			43.285.790.000	50.308.491.000	51.597.740.000			42.169.651.491	47.521.562.562	40.150.486.20			97,42	94,46	77,81		
	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah					16.219.200.000			13.500.000.000	18.882.960.000	24.704.280.000			12.555.877.753	18.120.860.580	16.108.709.764			93	95,96	65,20		

	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD					175.000.000			275.000.000	175.000.000	175.000.000			273.675.468	94.991.200	174.456.000			99,51	54,28	99,69		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses					29.837.370.000			29.510.790.000	31.250.531.000	26.718.460.000			29.340.098.270	29.225.790.782	23.867.320.440			99,42	93,52	89,33		
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					252.490.000			508.100.000	552.490.000	527.730.000			455.932.310	551.344.000	527.730.000			89,73	99,79	100		
	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD					252.490.000			508.100.000	552.490.000	527.730.000			455.932.310	551.344.000	527.730.000			89,73	99,79	100		
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD					28.322.390.000			22.955.844.000	29.201.566.000	60.821.298.000			20.316.263.308	25.775.507.997	36.963.323.504			88,50	88,27	60,77		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					28.322.390.000			22.955.844.000	29.201.566.000	60.821.298.000			20.316.263.308	25.775.507.997	36.963.323.504			88,50	88,27	60,77		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					170.855.337.000			79.431.417.000	198.100.137.000	222.527.747.000			70.459.773.496	195.080.660.331	219.393.723.445			88,71	98,48	98,59		
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD					90.118.063.000			49.153.268.000	104.454.063.000	85.579.909.000			43.333.136.397	103.172.989.447	84.223.137.682			88,16	98,77	98,41		

	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli					2.000.000.000			2.000.000.000	1.840.000.000	1.900.000.000			1.845.200.000	1.836.755.000	1.795900.000			92,26	99,82	94,52		
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					360.000.000			360.000.000	360.000.000	400.000.000			345.480.000	346.500.000	356.233.164			95,97	96,25	89,06		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					48.269.100.000			22.609.500.000	55.737.100.000	11.174.896.000			20.047.210.307	54.978.696.555	11.037.860.496			88,66	98,64	98,77		
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD					39.488.963.000			24.183.768.000	46.516.963.000	72.105.013.000			21.095246.090	46.011.037.892	71.033.144.022			87,22	98,91	98,51		
	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah					80.737.274.000			30.278.149.000	93.646.074.000	136.947.838.000			27.126.637.099	91.907.670.884	135.170.585.763			89,59	98,14	98,70		
	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi					80.737.274.000			30.278.149.000	93.646.074.000	136.947.838.000			27.126.637.099	91.907.670.884	135.170.585.763			89,59	98,14	98,70		
	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi								141.217.729.000	147.368.264.000				139.826.600.898	146.984.211.875				99,01	99,74			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					156.873.108.000					168.434.224.000					153.284.403.7					91,01		

															90							
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.012.567.000			820.000.000	1.107.567.000	1.172.567.000			810.757.664	1.105.904.469	1.164.392.421			98,87	99,85	99,30		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					712.567.000			490.000.000	757.567.000	812.567.000			484.250.355	756.650.811	805.104.447			98,82	99,88	99,08		
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					300.000.000			330.000.000	350.000.000	360.000.000			326.507.309	349.253.658	359.287.974			98,94	99,79	99,80		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.513.666.000			18.377.180.000	18.525.473.000	19.914.782.000			17.974.788.413	18.314.848.712	18.974.772.391			97,81	98,86	95,28		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.508.666.000			17.527.180.000	17.485.473.000	18.849.782.000			17.129.999.388	17.279.532.752	17.976.251.355			97,73	98,82	95,37		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1.005.000.000			850.000.000	1.040.000.000	1.065.000.000			844.789.025	1.035.315.960	998.521.036			99,38	99,55	93,76		
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					137.346.875.000			122.020.549.000	127.735.224.000	147.346.875.000			121.041.054.821	127.563.458.694	133.145.238.978			99,20	99,87	90,36		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					137.346.875.000			122.020.549.000	127.735.224.000	147.346.875.000			121.041.054.821	127.563.458.694	133.145.238.978			99,20	99,87	90,36		

	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi								55.193.143.000	45.091.068.000				52.191.799.657	43.716.872.432				94,56	96,95			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					43.703.102.000					40.041.648.000					38.264.874.481					95,56			
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.055.674.000			853.674.000	1.035.674.000	1.055.674.000			791.416.900	998.052.350	988.929.853			92,71	96,37	93,68		
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1.055.674.000			853.674.000	1.035.674.000	1.055.674.000			791.416.900	998.052.350	988.929.853			92,71	96,37	93,68		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					570.101.000			556.428.000	570.101.000	658.684.000			544.822.560	552.345.987	638.535.680			97,91	96,89	96,94		
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					176.808.000			145.000.000	176.808.000	196.371.000			143.106.810	175.863.000	189.731.180			98,69	99,45	96,62		
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					393.293.000			411.428.000	380.393.000	393.293.000			401.715.750	363.582.987	382.277.000			97,63	95,58	97,20		
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0					69.020.000					66.527.500					96,39		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.415.780.000			3.490.468.000	4.181.553.000	3.685.842.000			3.461.545.301	4.048.558.827	3.387.906.808			99,17	96,82	91,92		

	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					497.212.000			92.394.000	497.212.000	435.701.000			88.682.700	492.019.500	421.943.700			95,98	98,96	96,84		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					133.879.000			133.879.000	123.079.000	133.879.000			126.774.060	123.074.926	123.075.000			94,69	99,99	91,93		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					480.500.000			438.450.000	480.500.000	480.500.000			437.462.000	442.720.000	351.355.000			99,77	92,14	73,12		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.168.427.000			1.430.000.000	1.900.000.000	1.450.000.000			1.419.609.230	1.811.151.750	1.315.993.000			99,27	95,32	90,76		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					980.400.000			1.285.745.000	980.400.000	980.400.000			1.279.024.436	979.702.701	980.305.758			94,98	99,93	99,99		
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					155.362.000			110.000.000	200.362.000	205.362.000			109.992.875	199.889.950	195.234.350			99,99	99,76	95,07		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7.480.198.000			23.808.287.000	8.003.095.000	5.051.717.000			22.434.740.090	7.731.644.820	4.841.159.884			94,23	96,61	95,83		
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan					3.250.000.000			2.222.480.000	3.067.500.000	0			2.130.500.000	3.067.500.000	0			95,86	100	0		
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel					494.226.000			8.285.097.000	537.226.000	585.726.000			8.007.452.500	414.830.000	545.215.000			96,65	77,22	93,08		

	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.335.972.000			6.809.730.000	1.711.222.000	1.650.459.000			5.966.625.460	1.605.550.000	1.537.237.000			87,62	93,82	93,14		
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.400.000.000			6.490.980.000	2.687.147.000	2.815.532.000			6.330.162.130	2.643.764.820	2.758.707.884			97,52	98,39	97,98		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					18.915.879.000			15.532.116.000	19.315.879.000	19.467.015.000			14.514.414.426	19.069.214.933	19.183.090.124			93,45	98,72	98,54		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					198.457.000			130.000.000	198.457.000	198.457.000			129.835.385	198.348.600	197.404.000			99,87	99,96	99,47		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2.500.000.000			2.860.000.000	2.900.000.000	3.100.000.000			2.279.059.759	2.897.195.278	3.018.231.			79,69	99,90	97,36		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.017.582.000			982.582.000	1.017.582.000	986.300.000			867.820.861	1.009.720.000	986.201.50			88,32	99,23	99,99		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					15.199.840.000			11.559.534.000	15.199.840.000	15.182.258.000			11.237.698.421	14.963.951.055	14.981.252.966			97,21	98,45	98,68		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.306.349.000			8.996.049.000	10.025.645.000	8.163.595.000			8.758.419.460	9.843.976.756	7.731.241.916			97,36	98,19	94,70		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan					502.800.000			422.875.000	622.800.000	609.611.000			361.984.765	605.374.741	522.397.010			85,60	97,20	85,69		

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					3.171.286.000			3.743.801.000	3.427.582.000	2.963.440.000			3.689.623.425	3.367.423.816	2.722.618.550			98,55	98,24	91,87		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel					51.475.000			40.000.000	51.475.000	51.475.000			39.790.000	51.475.000	51.475.000			99,48	100	100		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2.007.639.000			2.576.138.000	2.982.639.000	2.029.980.000			2.571.023.000	2.976.381.000	1.998.767.274			99,80	99,79	98,46		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.573.149.000			2.213.235.000	2.941.149.000	2.509.089.000			2.095.998.270	2.843.322.199	2.435.984.082			94,70	96,67	97,09		
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					1.959.121.000			1.956.121.000	1.959.121.000	1.959.121.000			1.686.440.920	1.473.078.759	1.494.010.			86,21	75,19	76,26		
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					1.393.000.000			1.390.000.000	1.393.000.000	1.393.000.000			1.316.520.920	1.339.056.500	1.375.379.			94,71	96,13	98,74		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					566.121.000			566.121.000	566.121.000	566.121.000			369.920.000	134.022.259	118.630.736			65,34	23,67	20,96		

Pada pagu anggaran di tahun 2021 terdapat tiga kegiatan yang memiliki serapan anggaran dibawah 70% yaitu pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. Permasalahan yang di hadapi pada Kegiatan :

1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang di mungkinkan tidak mencapai target yang telah direncanakan pada Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa permasalahan diantaranya bahwa pada saat ini sedang mengalami Pandemi Covid-19 sehingga berdampak terhadap semua kegiatan aktivitas DPRD yang dialihkan dari program kegiatan Raperda dialihkan kepada Pendampingan Daerah Pemilihan selain itu adanya kendala regulasi yang tidak memperbolehkan adanya aktivitas kerumunan, pada esensinya proses Penyusunan dan pembahasan Raperda dibutuhkan sebuah kumpulan/berkerumun dan diskusi substantif, kendala lain adanya Raperda yang belum disampaikan oleh Gubernur yang terkendala dengan adanya aturan bahwa Pembentukan Pansus yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi;
2. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik Memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 744.293.000,- realisasi keuangan 53,94% sehingga sisa anggaran sebesar Rp.342.853.337,- Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan saat ini masa pandemic sehingga berdampak terhadap semua kegiatan aktivitas DPRD yang dialihkan dari program kegiatan pengawasan kode etik dialihkan kepada pendampingan Daerah Pemilihan masing-masing. Agar capaian realisasi dapat terpenuhi maka upaya yang dilakukan adalah dilakukan penjadwalan kegiatan yang belum terselesaikan oleh Badan Musyawarah pada Bulan Desember. Dibandingkan dengan tahun 2020 anggaran tahun 2021 terjadi pengurangan dikarenakan refocusing anggaran yang dialihkan untuk anggaran COVID-19. karena dampak dari pandemi COVID-19 adalah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna pencegahan dan menekan penyebaran Covid-19, yaitu dengan mengurangi kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah maunpun luar daerah yang menggunakan transportasi pesawat terbang, mengurangi kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, atau dengan melibatkan banyak orang, mengurangi penggunaan penginapan atau sewa ruang, sehingga anggaran tidak dapat terserap seluruhnya. Meskipun anggaran tidak dapat terealisasi sepenuhnya, namun kegiatan tetap dapat

dilaksanakan sesuai dengan program dan perencanaannya yakni melalui aplikasi secara virtual dan surat menyurat, hal ini juga dapat dikatakan Sekretariat DPRD melakukan efisiensi anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2021.

2.4 PERMASALAHAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis yang bisa diartikan perlu adanya metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam meningkatkan layanan pendukung pelaksanaaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah, bisa digambarkan melalui peningkatan layanan kedewanan yang menjadi program Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu- isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel

Peluang dan Tantangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2025-2029

Aspek	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
Kelembagaan	1. Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah; 2. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan; 4. Mensinergikan regulasi / peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan	1. Memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; 2. Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal; 3. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat; 4. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas – tugas Kedewanan secara berkesinambungan; 5. Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin

	optimalisasi tertib; 5. Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan; 6. Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan; 7. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik 8. Terbentuknya jejaring kerja dengan stakehoder, perguruan tinggi, institusi pemerintah, media masa dan elektronik.	berkurangnya pegawai karena pensiun/ purna tugas; 6. Kemungkinan Adanya penambahan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada pemilu 2024 dan sebagai tahun politik yang akan meningkatkan tuntutan kepada pelayanan terhadap kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi / lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 s/d 2029 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan

mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath). Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan tersebut maka dituangkan dalam tabel berikut ini :

Adapun permasalahan pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum meningkatnya pelayanan kedewanan	1. Belum terwujudnya hubungan antara setwan dengan DPRD yang baik	1. Belum terwujudnya fasilitasi tusi DPRD 2. Belum terbangunnya komunikasi yang baik antara DPRD dan Setwan 3. Kurangnya kapasitas SDM yang memadai
		2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar	1. Belum terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kedewanan 2. Belum tersedianya standar pelayanan kedewanan 3. Perlunya peningkatan fasilitas publikasi kedewanan
		3. Belum tersusunya perencanaan yang sinergis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD	1. Belum terbangunnya komunikasi yang baik antara DPRD dan Setwan 2. Perlunya peningkatan kapasitas SDM Sekretariat DPRD dan DPRD
2	Perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah	Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM dalam meningkatkan pelayanan di Sekretariat DPRD
		1. Perlunya peningkatan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Kurangnya Pemahaman tentang Manajemen Risiko

Secara keseluruhan permasalahan dalam pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah

1. Ketersediaan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi DPRD yang masih belum memadai;
2. Kurangnya komunikasi yang menyebabkan pelaksanaan agenda kegiatan DPRD tidak berjalan optimal;
3. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang masih belum memadai.

2.5 ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan dan program yang tepat pada periode perencanaan lima tahun ke depan, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah perlu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai isu strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Isu strategis yang diidentifikasi ini akan menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program pembangunan lima tahun mendatang, sehingga peran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pendukung tugas kedewanan dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Berikut ini perumusan isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang disimpulkan dari :

a. Gambaran pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Sesuai dengan Pergub No 55 Tahun 2016 dimana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadapa tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka secara normatif, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

   Dalam penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing- masing lingkup pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Provinsi tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat

pusat maupun Provinsi melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Yang ingin dicapai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang pertama yaitu terwujudnya hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik dengan membangun komunikasi yang baik antara DPRD dan Setwan serta kapasitas SDM memadai. Kedua, meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia dengan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kedewanan, tersedianya standar pelayanan kedewanan, harmonisasi dokumen Renja dan digitalisasi layanan kedewanan.

d. Implikasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

   Berdasarkan Pergub No. 55 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 pasal 10 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak & fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

Dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan pelaksanaan Rencana Kerja DPRD guna memastikan pencapaian target kinerja dan fungsi kelembagaan

   Melibatkan proses yang memastikan bahwa semua kegiatan legislatif dan administratif terkelola dengan baik yang bertujuan agar setiap target yang ada dalam Rencana Kerja DPRD dapat tercapai secara optimal, mendukung kinerja legislatif, dan memastikan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat berjalan dengan baik. Pelaksanaan jadwal kegiatan DPRD sebelumnya sudah

ditetapkan dan dituangkan ke dalam berita acara, namun implementasinya agenda DPRD tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Hal ini berdampak pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta sering berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat mengakibatkan mempengaruhi terhadap kinerja Sekretariat DPRD. Padatnya jadwal kegiatan DPRD mengakibatkan jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disepakati ada kalanya tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal hal ini disebabkan banyaknya kegiatan di luar dari kegiatan Sekretariat DPRD sehingga kegiatan yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana karena berbenturan waktu dengan kegiatan yang lain;

2. Pengembangan kapasitas SDM Sekretariat DPRD untuk mendukung kualitas pelayanan dan efektivitas kinerja legislatif

   Berfokus pada menciptakan tim yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan dalam mendukung DPRD agar dapat menjalankan tugas legislatif dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Setwan saat ini, masih belum mencukupi. Kebutuhan Setwan dalam menjalankan tugasnya banyak membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi. Untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD belum memenuhi dalam mendukung semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya. Sehingga terjalin lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar DPRD dan Setwan serta menumbuhkan semangat kerja dalam melaksanakan tugas yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

3. Peningkatan fasilitasi penunjang urusan kedewanan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD

   Berarti memastikan bahwa semua elemen yang mendukung

tugas DPRD dapat berfungsi dengan baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas DPRD dalam menjalankan tugasnya. Maka keterbatasan sarana/prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas- tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan fasilitasi penunjang kedewanan. Serta peningkatkan pelayanan administrasi dalam memfasilitasi ketersediaan kebutuhan rumah tangga untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak terkait langsung dalam potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah.

Tabel
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
-	1. Kurangnya komunikasi yang menyebabkan pelaksanaan agenda kegiatan DPRD tidak berjalan optimal	-	-	-	-	Penguatan pelaksanaan Rencana Kerja DPRD guna memastikan pencapaian target kinerja dan fungsi kelembagaan
-	1. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang masih belum memadai	-	-	-	-	Pengembangan kapasitas SDM Sekretariat DPRD untuk mendukung kualitas pelayanan dan efektivitas kinerja legislatif
-	3. Ketersediaan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi DPRD yang masih belum memadai	-	-	-	-	Peningkatan fasilitasi penunjang urusan kedewanan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Prov. Jawa Tengah

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isustrategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2029 ditetapkan dengan mengacu dan mempedomani Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2029. Adapun tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025- 2029 yang tertuang dalam rancangan Renstra yaitu :

1. **Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Kedewanan**

   Sasaran :

   a. Terwujudnya hubungan Sekretariat DPRD dengan DPRD yang baik;
   b. Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang tersedia.

2. **Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat DPRD**

   Sasaran :

   a. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat DPRD;
   b. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat DPRD.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan sesuai dengan cascading Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang disusun ke dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	*Baseline* Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Pelayanan Kedewanan		Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	angka	-	90	91	92	92,5	93	93,5	94	94
		Terwujudnya Hubungan Sekretariat DPRD dengan DPRD Yang baik	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	angka	-	75	76	77	77,5	78	78,5	79	79
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang tersedi	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	angka	-	75	76	77	77,5	78	78,5	79	79

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat DPRD		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	Angka	-	70	77	77,1	77,2	77,3	77,4	77,5	77,5
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	76	77	78	78,5	79	79,5	80	80
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat Daerah di Sekretariat DPRD	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	Angka	-	2,75	3	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25	3,25

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mencapai tujuan dan sasaran renstra dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD tahun 2025 – 2029 salah satu tusinya adalah memfasilitasi penyusunan peraturan daerah (perda) yang berpihak pada kesetaraan gender dan responsif gender, serta memastikan perda yang sudah ada diterapkan

dengan prinsip keadilan gender.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan kedewanan	Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia	Mencukupi kebutuhan rencana kerja DPRD sesuai dengan regulasi	Optimalisasikan Fasilitasi rencana kerja DPRD sesuai dengan regulasi dan kebutuhan
	Terwujudnya hubungan antara Setwan denngan DPRD yang baik	Meningkatkan pola pikir dan budaya kerja dalam mewujudkan kinerja Setwan yang berkualitas	Mengoptimalkan kemampuan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setwan
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat DPRD	Meningkatkan Kualitas perencanaan dan evaluasi daerah perangkat	Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang lebih berkualitas
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kepegawaian dan pelayanan administrasi keuangan	Menyediakan kebutuhan rumah tangga, kepegawaian dan pelayanan administrasi keuangan yang dibutuhkan

Selain itu, disajikan pentahapan pembangunan yang dimaksudkan untuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Prioritas dalam setiap tahapan harus mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan sebelumnya. Pentahapan dimaksud disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3

Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas pengawasan dengan didukung digitalisasi proses	Peningkatan partisipasi masyarakat dengan penguatan penyerapan aspirasi dan pengawasan tematik ketahanan pangan	Perwujudan Parlemen Modern	Menuju Parlemen Pendidikan untuk memperkuat pelaksanaan 3 fungsi DPRD	Perwujudan Parlemen Pendidikan untuk mendukung kualitas pelaksanaan 3 fungsi

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya. Sedangkan untuk rencana tindak pengendalian pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	Publikasi dan pendokumentasian tidak dapat dilaksanakan secara merata	8	Pelaksanaan publikasi dan pendokumentasian kedewanan belum terakomodir seluruhnya	Persebaran informasi terpusat pada wilayah-wilayah tertentu	Mengadakan rapat koordinasi antara Setwan dan DPRD untuk menentukan publikasi media masa (cetak,online, media elektrokinik, dan media luar ruang)	Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah	2029

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Program kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil *(outcome)* dan keluaran *(output)* dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk pencapaiannya selama tahun 2025-2029.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
   Program ini diarahkan pada kegiatan penunjang pelayanan umum kepegawaian dan keuangan, serta perencanaan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
   Program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terdiri dari 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan:

1) Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD :
   a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik :
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD
3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan :
   a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
   b. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;

c. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
d. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
e. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
f. Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ;
g. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran.

4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD :
a. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD;
b. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli ;
c. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi ;
d. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD;
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.

5) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD :
a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

6) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran :
a. Sub Kegiatan Pembahasan APBD

7) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat :
a. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah ;
b. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ;
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.

8) Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah :
a. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi terdiri dari 9 kegiatan, dan 31 sub kegiatan ;

1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
c. Sub Kegiatan Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
e. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

2) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah :
a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;

b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

c. Sub Kegiatan Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan ;

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;

b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan ;

c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel ;

d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;

e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ;

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel ;

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

7) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

8) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

9) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD :

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD ;

b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD ;

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

Adapun rincian program kegiatan dan sub kegiatan Sekretatiat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat
DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Output/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(	(	(	(	(	(	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(
Meningkatkan Pelayanan Kedewanan *				Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah *	Angka	90	91	92	349,013,564,000	92.5	349,013,564,000	93	349,013,564,000	93.5	349,013,564,000	94	362,646,697,000	Sekretariat DPRD	
	Terwujudnya Hubungan Sekre			Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	75	76	77	100,978,975,000	77.5	100,978,975,000	78	100,978,975,000	78.5	100,978,975,000	79	100,978,975,000	Sekretariat DPRD	
		Meningkatnya Fasilitasi Layan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN	Nilai survei kepuasan layanan persida	Angka	N/A	N/A	75	100,978,975,000	75.5	100,978,975,000	76	100,978,975,000	76.5	100,978,975,000	77	100,978,975,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	

		Terlaksanaya fasilitasi	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Fasilitasi penyusunan RAPERDA	Angka	N/A	N/A	23	7,360,042,000	23	7,360,042,000	23	7,360,042,000	23	7,360,042,000	23	7,360,042,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidanga n	
		Terlaksanaya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Dokumen	N/A	23	23	5,542,442,000	23	5,542,442,000	23	5,542,442,000	23	5,542,442,000	23	5,542,442,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidanga n	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian Persida
		Terlaksanaya Sosialisasi Peraturan Daerah Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama Pemerintah Daerah *****a oleh	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilak DPRD dan Pemerintah	Orang	N/A	N/A	600	1,817,600,000	600	1,817,600,000	600	1,817,600,000	600	1,817,600,000	600	1,817,600,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidanga n	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian Persidangan
		Terlaksanaya fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Angka	N/A	N/A	2	1,910,534,000	2	1,910,534,000	2	1,910,534,000	2	1,910,534,000	2	1,910,534,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidanga n	

		Terlaksananya Pembahasan APBD	Pembahasan APBD *****	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD *****	Dokumen	N/A	2	2	1,910,534,000	2	1,910,534,000	2	1,910,534,000	2	1,910,534,000	2	1,910,534,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian
		Meningkatnya fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerint	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ****	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Angka	N/A	N/A	3	11,915,950,000	3	11,915,950,000	3	11,915,950,000	3	11,915,950,000	3	11,915,950,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemeri	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerint	Laporan	N/A	48	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian Persida
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Laporan	N/A	48	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian

		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejа	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahte	Laporan	N/A	48	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian Persida
		Terlaksanaanya Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian *****	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian *****	Laporan	N/A	48	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian Persidangan
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam *****	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam *****	Laporan	N/A	48	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	48	1,834,052,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian Persidangan

		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriks	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Dokumen	N/A	1	1	1,149,830,000	1	1,149,830,000	1	1,149,830,000	1	1,149,830,000	1	1,149,830,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian Persidangan
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan	Dokumen	N/A	25	25	1,595,860,000	25	1,595,860,000	25	1,595,860,000	25	1,595,860,000	25	1,595,860,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH
		Meningkatnya kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD ****	Jumlah DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam	Orang	N/A	N/A	120	3,933,341,000	120	3,933,341,000	120	3,933,341,000	120	3,933,341,000	120	3,933,341,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas	Pendalaman Tugas DPRD *****	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	N/A	6	6	3,933,341,000	6	3,933,341,000	6	3,933,341,000	6	3,933,341,000	6	3,933,341,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH

		Terlaksananya fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat ****	Jumlah Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Angka	N/A	N/A	5	50,543,046,000	5	50,543,046,000	5	50,543,046,000	5	50,543,046,000	5	50,543,046,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	
		Terselenggarany a Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Lapora	N/A	24	24	10,761,502,000	24	10,761,502,000	24	10,761,502,000	24	10,761,502,000	24	10,761,502,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidang a n	35 Kab/Kota, JAWA TENGA H
		Tersu sunny a Pokok -	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang	Dokumen	N/A	1	1	175,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidang a n	35 Kab/Kota, JAWA TENGA H
		Terlaksanaanya Reses	Pelaksanaan Reses *****	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses *****	Dokumen	N/A	24	24	39,606,544,000	24	39,606,544,000	24	39,606,544,000	16	39,606,544,000	24	39,606,544,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidang a n	35 Kab/Kota, JAWA TENGA H Bagian
		Terlaksanaanya fasilitasi Pelaksanaan dan	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD ****	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik ****	Angka	N/A	N/A	21	552,860,000	21	552,860,000	21	552,860,000	21	552,860,000	21	552,860,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	

		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD *****	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD *****	Dokumen	N/A	21	21	552,860,000	21	552,860,000	21	552,860,000	21	552,860,000	21	552,860,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian Persidangan
		Terlaksananya fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD ****	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD ****	Angka	N/A	N/A	12	24,763,202,000	12	24,763,202,000	12	24,763,202,000	12	24,763,202,000	12	24,763,202,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD *****	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD *****	Dokumen	N/A	12	12	24,763,202,000	12	24,763,202,000	12	24,763,202,000	12	24,763,202,000	12	24,763,202,000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian Persidangan

	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang tersedia **			Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD) **	Angka	75	76	77	248,034,589,000	77.5	248,034,589,000	78	248,034,589,000	78.5	248,034,589,000	79	261,667,722,000	Sekretariat DPRD	
		Meningkatnya Fasilitasi Layanan Kehumasan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD ***	Nilai survei kepuasan layanan kehumasan ***	Angka	N/A	N/A	75	248,034,589,000	75.5	248,034,589,000	76	248,034,589,000	76.5	248,034,589,000	77	261,667,722,000	Sekretariat DPRD - Bagian Hubungan Masyarakat	
		Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD dan layanan kehumas	Peningkatan Kapasitas DPRD ****	Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD dan layanan kehumasan ****	Angka	N/A	N/A	4	121,330,383,000	4	121,330,383,000	4	121,330,383,000	4	121,330,383,000	4	134,963,516,000	Sekretariat DPRD - Bagian Hubungan Masyarakat	

		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli *****	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli *****	Orang	N/A	42	42	2,173,208,000	42	2,173,208,000	42	2,173,208,000	42	2,173,208,000	42	2,173,208,000	Sekretariat DPRD - Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat KOTA SEMA
		Tersedianya Tenaga Ahli Frak	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi *****	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi *****	Orang	N/A	8	8	454,190,000	8	454,190,000	8	454,190,000	8	454,190,000	8	454,190,000	Sekretariat DPRD - Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat KOTA SEMA
		Terselenggarany a Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat *****	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Hubungan Masyarakat *****	Dokumen	N/A	6	6	13,281,261,000	6	13,281,261,000	6	13,281,261,000	6	13,281,261,000	6	13,281,261,000	Sekretariat DPRD - Bagian Hubungan Masyarakat	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian Hubungan Masyarakat
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD *****	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD *****	Dokumen	N/A	7	7	105,421,724,000	7	105,421,724,000	7	105,421,724,000	7	105,421,724,000	7	119,054,857,000	Sekretariat DPRD - Bagian Hubungan Masyarakat	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian Hubun

		Terlaksananya publikasi melalui berbagai media	Pembahasan Kerja Sama Daerah ****	Jumlah publikasi melalui berbagai media ****	Angka	N/A	N/A	4	126,704,206,000	4	126,704,206,000	4	126,704,206,000	4	126,704,206,000	4	126,704,206,000	Sekretariat DPRD - Bagian Hubungan Masyarakat	
		Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi *****	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun *****	Dokumen	N/A	12	12	126,704,206,000	12	126,704,206,000	12	126,704,206,000	12	126,704,206,000	12	126,704,206,000	Sekretariat DPRD - Bagian Hubungan Masyarakat	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bagian Hubungan M
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat DPRD *				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD *	Angka	70	77	77.1		77.2		77.3		77.4		77.5		Sekretariat DPRD	

	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat DPRD **		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat DPRD **	Angka	2.75	3	3.05	187,050,027,000	3.1	191,066,496,000	3.15	195,066,496,000	3.2	199,066,496,000	3.25	209,280,820,000	Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretari	%	100	100	100	187,050,027,000	100	191,066,496,000	100	195,066,496,000	100	199,066,496,000	100	209,280,820,000	Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan	%	100	100	100	967,739,000	100	967,739,000	100	967,739,000	100	967,739,000	100	967,739,000	Sekretariat DPRD	

		Tersusunnya Dokumen Perencanaa	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	6	6	706,015,000	6	706,015,000	6	706,015,000	6	706,015,000	6	706,015,000	Sekretariat DPRD	35 Kab/Kota, JAWA TENGA
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	N/A	20	20	251,724,000	20	251,724,000	20	251,724,000	20	251,724,000	20	251,724,000	Sekretariat DPRD	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup	Data	N/A	N/A	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Sekretariat DPRD	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH OPD Provins
		Terselenggarany a Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Dokumen	N/A	N/A	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Sekretariat DPRD	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH OPD

		Meningkatnya layanan administrasi keuang	Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangk	Dokumen	24	24	24	20,735,413,000	24	20,751,882,000	24	20,751,882,000	24	20,751,882,000	24	20,966,206,000	Sekretariat DPRD	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****	Jumlah Orang y a n g	Orang/Bulan	N/A	116	116	19,726,965,000	116	19,743,434,000	116	19,743,434,000	116	19,743,434,000	116	19,957,758,000	Sekretariat DPRD	KOTA SEMARANG OPD
		Tersediany a Administrasi	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana	Dokumen	N/A	24	24	1,008,448,000	24	1,008,448,000	24	1,008,448,000	24	1,008,448,000	24	1,008,448,000	Sekretariat DPRD	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH
		Meningkatnya layanan keuangan dan kesejah	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD ****	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang	%	N/A	100	100	165,346,875,000	100	169,346,875,000	100	173,346,875,000	100	177,346,875,000	100	187,346,875,000	Sekretariat DPRD	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota	Penyelenggaraa n Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan	Orang/Bulan	N/A	120	120	165,346,875,000	120	169,346,875,000	120	173,346,875,000	120	177,346,875,000	120	187,346,875,000	Sekretariat DPRD	KOTA SEMARANG OPD Provins

	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat DPRD **		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	Angka	76	77	80	44,822,390,000	81	41,323,990,000	82	41,114,786,000	83	40,981,400,000	84	43,772,196,000	Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kepegawaian perang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD ***	%	100	100	100	44,822,390,000	100	41,323,990,000	100	41,114,786,000	100	40,981,400,000	100	43,772,196,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	
	Meningkatnya layanan administrasi baran	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perang	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik	Dokumen	12	12	12	1,275,674,000	12	1,325,674,000	12	1,316,470,000	12	1,307,266,000	12	1,298,062,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	

		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	Dokumen	N/A	12	12	1,275,674,000	12	1,325,674,000	12	1,316,470,000	12	1,307,266,000	12	1,298,062,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai	%	100	100	100	600,101,000	100	600,101,000	100	600,101,000	100	600,101,000	100	600,101,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGA
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Adminis	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaw	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Dokumen	N/A	12	12	206,808,000	12	206,808,000	12	206,808,000	12	206,808,000	12	206,808,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH

		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	N/A	75	100	393,293,000	100	393,293,000	100	393,293,000	100	393,293,000	100	393,293,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangk	Administrasi Umum Perangkat Daerah ****	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	100	100	3,856,952,000	100	3,956,952,000	100	4,056,952,000	100	4,156,952,000	100	4,656,952,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang	Paket	N/A	12	12	435,701,000	12	435,701,000	12	435,701,000	12	435,701,000	12	435,701,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH OPD
		Tersedianya Bahan Logistik	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	N/A	12	12	182,189,000	12	182,189,000	12	182,189,000	12	182,189,000	12	182,189,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGA

		Tersediany a Bahan Bacaan dan Peraturan Perund	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dokumen	N/A	12	12	480,500,000	12	480,500,000	12	480,500,000	12	480,500,000	12	480,500,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Terlaksanany a Fasilitasi Kunjun	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	N/A	12	12	1,600,000,000	12	1,700,000,000	12	1,800,000,000	12	1,900,000,000	12	2,400,000,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGA
		Terlaksanany a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	N/A	12	12	980,400,000	12	980,400,000	12	980,400,000	12	980,400,000	12	980,400,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH OPD
		Terlaksanany a Penatausahaan Arsip Dinamis	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	4	4	178,162,000	4	178,162,000	4	178,162,000	4	178,162,000	4	178,162,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH

		Tersediany a bara ng milik daera h penu	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemeri	Jumlah unit barang milik daerah penunja ng urusan	Uni t	131	148	137	6,157,753 , 000	132	2,909,353, 000	132	2,909,353 , 000	132	2,885,171 , 000	132	2,885,171 , 000	Sekretaria t DPRD - Bagian Umum	
		memiliki nilai asset		disediakan ****															
		Tersed ianya Kenda raan Perora ngan Dinas atau Kenda	Pengada an Kendara an Peroran gan Dinas atau Kendara	Jumlah Unit Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	Uni t	N/A	6	5	3,198,400 , 000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Sekretaria t DPRD - Bagian Umum	35 kab/ko ta, JAWA TENGA H OPD Provins
		Tersedi anya Kendar aan Dinas Operasi onal atau	Pengada an Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n	Jumlah Unit Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Disediaka	Uni t	N/A	10	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Sekretaria t DPRD - Bagian Umum	35 kab/ko ta, JAWA TENGA H OPD
		Tersedian ya Mebel	Pengadaan Mebel *****	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Pake t	N/A	2	2	276,640,0 00	2	276,640,0 00	2	276,640,0 00	2	276,640,0 00	2	276,640,0 00	Sekretaria t DPRD -	35 kab/kot a, JAWA

		Tersedianya Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	N/A	24	24	381,288,000	24	381,288,000	24	381,288,000	24	381,288,000	24	381,288,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	N/A	106	106	2,301,425,000	106	2,251,425,000	106	2,251,425,000	106	2,227,243,000	106	2,227,243,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH OPD
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Laporan	48	48	48	23,254,234,000	48	23,354,234,000	48	23,454,234,000	48	23,554,234,000	48	24,054,234,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	N/A	12	12	196,957,000	12	196,957,000	12	196,957,000	12	196,957,000	12	196,957,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH

		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	N/A	12	12	3,639,000,000	12	3,739,000,000	12	3,839,000,000	12	3,939,000,000	12	4,439,000,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH OPD Provins
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Laporan	N/A	12	12	1,031,086,000	12	931,086,000	12	931,086,000	12	931,086,000	12	931,086,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH OPD
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	Laporan	N/A	12	12	18,387,191,000	12	18,487,191,000	12	18,487,191,000	12	18,487,191,000	12	18,487,191,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH OPD

		Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerint	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	Unit	N/A	160	160	7,718,675,000	160	7,218,675,000	160	6,818,675,000	160	6,518,675,000	160	7,818,675,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	
		Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	N/A	10	10	502,800,000	10	502,800,000	10	502,800,000	10	502,800,000	10	502,800,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	N/A	72	72	3,027,582,000	72	2,927,582,000	72	2,827,582,000	72	2,727,582,000	72	3,027,582,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH OPD
		Kendaraan Dinas Operasional atau	Dinas Operasional atau Lapangan *****	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****															

		Terlaksananya Pemeliharaan	Pemeliharaan Mebel *****	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	12	12	57,475,000	12	57,475,000	12	57,475,000	12	57,475,000	12	57,475,000	Sekretariat DPRD -	35 kab/kota, JAWA
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	3	3	1,699,503,000	3	1,499,503,000	3	1,399,503,000	3	1,299,503,000	3	1,799,503,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH
		Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	63	63	2,431,315,000	63	2,231,315,000	63	2,031,315,000	63	1,931,315,000	63	2,431,315,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH OPD
		Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD ****	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang	%	100	100	100	1,959,001,000	100	1,959,001,000	100	1,959,001,000	100	1,959,001,000	100	2,459,001,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Paket	N/A	4	4	1,392,880,000	4	1,392,880,000	4	1,392,880,000	4	1,392,880,000	4	1,892,880,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGAH

		Terlaksananya Medical Check Up	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	Orang	N/A	120	120	566,121,000	120	566,121,000	120	566,121,000	120	566,121,000	120	566,121,000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum	35 kab/kota, JAWA TENGA

Tabel 4.1.2

Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah
Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Memperkuat Kerjasama Pemerintahan	Pembuatan Forum Senayan Eling Jawa Tengah (DPR RI dan DPD RI)	1 Kegiatan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Bagian Humas	-
2.	Memperkuat Kerjasama Pemerintahah	Pembuatan Forum Berlian Membangun (DPRD)	1 Kegiatan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Bagian Humas	-
3.	Memperkuat Kerjasama Pemerintahah	Pembuatan Forum DPRD kab/kota	1 Kegiatan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Bagian Humas	-

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Setwan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 4.2.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	0	90	91	92	92.5	93	93.5	94	94
	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	0	75	76	77	77.5	78	78.5	79	79
	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	0	75	76	77	77.5	78	78.5	79	79

Tabel 4.2.2

Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 4.2.3

Indikator Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja SPM	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Penyusunan

Kaidah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Dalam regulasi ini, Renstra PD wajib disusun berdasarkan prinsip *evidence-based planning*, akuntabilitas kinerja, integrasi lintas sektor, serta keselarasan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah. Instruksi ini diterbitkan dalam rangka memperkuat integrasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta untuk menjamin keselarasan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di tingkat perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Renstra PD wajib disusun mengikuti prinsip-prinsip teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up, serta berbasis pada hasil evaluasi periode sebelumnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, prinsip ini menjadi penting untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesekretariatan, fasilitasi kelembagaan, dan dukungan terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD secara optimal.

Penyusunan Renstra harus dimulai dengan analisis lingkungan strategis, termasuk evaluasi kinerja periode sebelumnya, identifikasi isu strategis, serta kajian terhadap arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah. Selanjutnya, kaidah-kaidah perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja harus memenuhi prinsip *SMART* (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Dokumen Renstra wajib

disusun secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta mengikuti mekanisme konsultasi dan sinkronisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah). Kaidah ini menjamin bahwa Renstra tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang responsif terhadap tantangan pembangunan dan mendukung peran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal.

Kaidah ini bertujuan agar seluruh perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD, memiliki acuan baku dalam menyusun dokumen perencanaan yang terstruktur dan dapat diukur pencapaiannya.

Penyusunan Renstra juga diarahkan untuk mendukung indikator kinerja daerah, yang tertuang dalam RPJMD, serta memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Dalam praktiknya, penyusunan Renstra harus dimulai dengan analisis capaian kinerja lima tahun sebelumnya, pemetaan isu-isu strategis kelembagaan, serta identifikasi kebutuhan reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Instruksi ini juga menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk anggota DPRD, OPD terkait, masyarakat sipil, dan mitra kerja, guna memastikan bahwa program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah benar- benar responsif terhadap kebutuhan kelembagaan dan pembangunan daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran dalam Renstra harus selaras dengan indikator makro pembangunan daerah, serta mendukung penguatan fungsi representatif, partisipatif, dan transparan dari lembaga legislatif. Dengan mematuhi kaidah-kaidah tersebut, Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen

perencanaan yang kredibel, aplikatif, dan mampu mendorong pencapaian tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan berkinerja tinggi sesuai arah kebijakan nasional dan daerah.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk menjalankan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk menjalankan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti. Sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penyusunan Renstra ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan implementasi.

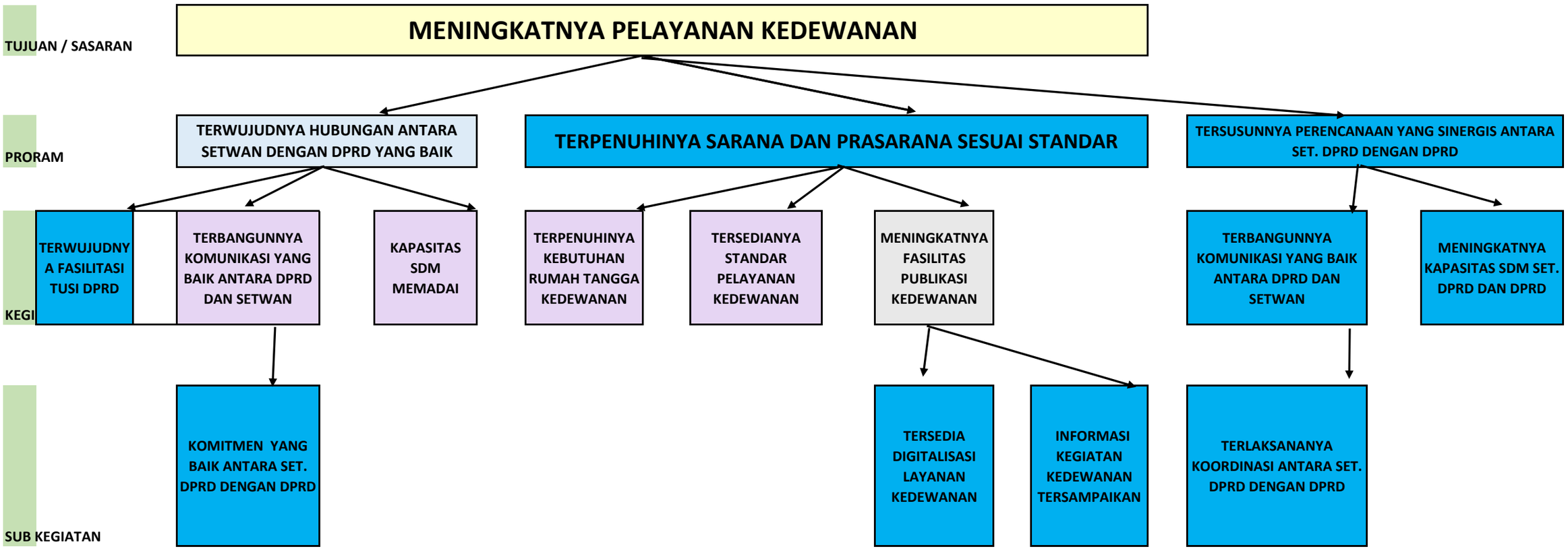
TUJUAN / SASARAN
MENINGKATNYA PELAYANAN KEDEWANAN
PRORAM
TERWUJUDNYA HUBUNGAN ANTARA SETWAN DENGAN DPRD YANG BAIK
TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR
TERSUSUNNYA PERENCANAAN YANG SINERGIS ANTARA SET. DPRD DENGAN DPRD
KEGI
TERWUJUDNYA FASILITASI TUSI DPRD
TERBANGUNNYA KOMUNIKASI YANG BAIK ANTARA DPRD DAN SETWAN
KAPASITAS SDM MEMADAI
TERPENUHINYA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEDEWANAN
TERSEDIANYA STANDAR PELAYANAN KEDEWANAN
MENINGKATNYA FASILITAS PUBLIKASI KEDEWANAN
TERBANGUNNYA KOMUNIKASI YANG BAIK ANTARA DPRD DAN SETWAN
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM SET. DPRD DAN DPRD
SUB KEGIATAN
KOMITMEN YANG BAIK ANTARA SET. DPRD DENGAN DPRD
TERSEDIA DIGITALISASI LAYANAN KEDEWANAN
INFORMASI KEGIATAN KEDEWANAN TERSAMPAIKAN
TERLAKSANANYA KOORDINASI ANTARA SET. DPRD DENGAN DPRD

CASCADING

TUJUAN

Meningkatnya Pelayanan Kedewanan
IK: Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
formulasi : Survei Kepuasan DPRD

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah
IK: Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)
formulasi : (Nilai x Bobot Komponen Pengungkit) + (Nilai x Bobot Komponen Hasil)

SASARAN I

TERWUJUDNYA HUBUNGAN ANTARA SETWAN DENGAN DPRD YANG BAIK
IK: Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (Survei Kepuasan DPRD)
Formulasi : PERMENPAN 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM

TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR
IK : Indeks kualitas sarana dan prasarana (Survei Kepuasan DPRD)
Formulasi : PERMENPAN 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
IK : Indeks Kepuasan Masyarakat
Formulasi : Nilai hasil survei kepuasan masyarakat dari 9 unsur SKM (skala 1-4) yang dikonversi menjadi IKM

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN RISIKO PERANGKAT DAERAH
IK : Indeks Manajemen Risiko
Formulasi : Total (Nilai Komponen MR x Bobot)

PROGRAM

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

BAGIAN

BAGIAN PERSIDANGAN

Sasaran Program : Meningkatnya Fasilitasi Layanan Persidangan

IK : Nilai survei kepuasan layanan persidangan

Formulasi : PERMENPAN 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM

DO : Surve Kepuasan untuk mengukur tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan persidangan

KEGIATAN	**1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**2. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik**	**1. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**3. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	**4. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi penyusunan Raperda	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas DPRD**	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Tugas DPRD**	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
	IK : Jumlah Fasilitasi penyusunan RAPERDA	IK : Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	IK : Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	IK : Jumlah DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pendalaman tugas	IK : Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	IK :Jumlah Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	IK : Jumlah Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi penyusunan Raperda	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	DO : Mengukur tingkat pencapaian fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	DO : Mengukur tingkat pencapaian fasilitasi Kapasitas DPRD	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Tugas DPRD	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
SUB KEGIATAN	**1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**	**1. Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD**	**1. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum**	**1. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD**	**1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**	**1. Sub Kegiatan Pembahasan APBD**	**1. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah**
	Sasaran SK : Tersedianya fasilitasi Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	**Sasaran SK : Tersedianya fasilitasi Kode Etik DPRD**	**Sasaran SK : Terlakananya fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum**	**Sasaran SK : Terlakananya fasilitasi Pendalaman Tugas DPRD**	**Sasaran SK : Terlakananya fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**	**Sasaran SK : Tersedianya fasilitasi Kegiatan Pembahasan APBD**	**Sasaran SK : Terlakananya fasilitasi Kunjungan Kerja dalam Daerah**
	IK : jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Raperda	IK : Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	IK : Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	IK : Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	IK : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	IK : jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	IK : Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD
	DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan dan pembahasan program pembentukan Raperda	DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi Kode Etik DPRD	DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pendalaman Tugas DPRD	DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembahasan APBD	DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi Kunjungan Kerja dalam Daerah
			2. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				**2. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**
			Sasaran SK : Terlakananya fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				**Sasaran SK : Tersusunya dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD**
			IK : Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur				IK :Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun
			DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur				DO : Mengukur hasil dokumen Pokok-Pokok Pikiran yang dihasilkan oleh DPRD

BAGIAN HUMAS

Sasaran Program : Meningkatnya Fasilitasi Layanan Kehumasan

IK : Nilai survei kepuasan layanan kehumasan

Formulasi : PERMENPAN 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM

DO : Surve Kepuasan untuk mengukur tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan kehumasan

KEGIATAN	**1. Kagiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya publikasi melalui berbagai media	**1. Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD (honor Tenaga Ahli &Fraksi, Prog. Kerja)** **2. Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas layanan kehumasan (Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat)**
	IK : Jumlah publikasi melalui berbagai media	1. IK : Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD 2. IK : Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas layanan kehumasan
	DO : Mengukur hasil pelaksanaan publikasi melalui berbagai media	1. DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD 2. DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas layanan kehumasan
SUB KEGIATAN	**1. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi**	**1. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli**
	Sasaran SK : Tersedianya fasilitasi Bahan Komunikasi dan Publikasi	**Sasaran SK : Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli**
	IK : jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	IK : jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli
	DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi Bahan Komunikasi dan Publikasi	DO : Mengukur penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
		Sasaran SK : Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi
		IK : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi
		DO : Mengukur penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

BAGIAN UMUM

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah

IK : Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah

Formulasi : Rata-Rata ((Realisasi Kegiatan/Target Kegiatan Kegiatan) x 100%)

DO : Mengukur rata-rata dari tingkat ketercapaian kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah

KEGIATAN	**1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthn Daerah**	**7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	**Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset**	**Sasaran Kegiatan : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD**
	IK : Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	IK : Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	IK : Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	IK : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	IK : Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar
	DO: Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal	DO : Mengukur hasil pelaksanaan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	DO : Mengukur kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan SOP yang berlaku	DO : Mengukur jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset yang disediakan oleh perangkat daerah	DO : Mengukur hasil dari penyediaan jasa penunjang jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	DO : Mengukur jumlah seluruh barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	DO : Mengukur tingkat layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar dalam satu tahun
SUB KEGIATAN	**1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**1. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD**
	Sasaran SK : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**Sasaran SK : Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Sasaran SK : Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian**	**Sasaran SK: Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan**	**Sasaran SK : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat**	**Sasaran SK : Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan**	**Sasaran SK : Terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD**
	IK : Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	IK : Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	IK : Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	IK : Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	IK : Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	IK : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	IK : Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan
	DO : Mengukur penyediaan instalasi listrik dan alat-alat kelistrikan/penerangan kantor dalam satu tahun	DO : Mengukur hasil pengamanan barang milik daerah perangkat daerah	DO : Mengukur hasil proses pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian termasuk seluruh kegiatan pelayanan kepegawaian perangkat daerah seperti koordinasi dengan BKN, BKD, pengurusan dokumen kepegawaian, kenaikan pangkat, pensiun, dan lainnya	DO : Memgukur jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan perangkat daerah dalam satu tahun	DO : Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya	DO : Mengukur jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya oleh perangkat daerah dalam satu tahun	DO : Mengukur jumlah/jenis pakaian dinas dan atributnya yang disediakan untuk DPRD sesuai standar dalam satu tahun
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		**3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs**	**2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan**	**2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD**
	Sasaran SK: Tersedianya bahan logistik kantor		**Sasaran SK : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi**	**Sasaran SK : Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan**	**Sasaran SK : Tersedianya jasa pelayanan umum kantor**	**Sasaran SK : Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan**	**Sasaran SK: Terlaksananya medical check up DPRD**
	IK :Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		IK :Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	IK : Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	IK : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	IK : Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	IK :Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD
	DO : Mengukur penyediaan bahan logistik kantor seperti BBM, obat-obatan, reagen laboratorium, dan lainnya dalam satu tahun		DO :Mengukur jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	DO : Memgukur jumlah kendaraan dinas operasional pendukung kegiatan operasional atau lapangan yang disediakan perangkat daerah dalam satu tahun	DO : Mengukur penyediaan jasa pelayanan umum kantor seperti penyediaan jasa tenaga outsourcing, jasa kebersihan, dan lainnya	DO : Mengukur jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinanya oleh perangkat daerah dalam satu tahun	DO : Mengukur jumlah anggota DPRD yang mendapatkan medical check up dalam satu tahun

BAGIAN KEUANGAN

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi PD

IK : Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah

Formulasi : Rata-rata ((Realisasi IKU PD/Target IKU PD) x 100%)

DO : Mengukur tingkat ketercapaian kinerja utama (Indikator Kinerja Utama/IKU) perangkat daerah dan perencanaan keuangan DPRD

KEGIATAN	**1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD**
	IK : Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	IK : Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	IK : JPersentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar
	DO : Mengukur proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	DO : Mengukur hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah setiap ta	DO : Mengukur tingkat layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar dalam satu tahun
SUB KEGIATAN	**1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**
	Sasaran SK : Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	**Sasaran SK : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN**	**Sasaran SK : Tersedianya hak keuangan anggota DPRD**
	IK : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	IK :Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	IK : Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD
	DO : Mengukur semua jenis dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh perangkat daerah	DO: Mengukur berapa jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam satu tahun	DO : Mengukur penyediaan hak keuangan untuk DPRD yang dipenuhi dalam satu tahun
	2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Sasaran SK : Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Sasaran SK : Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	
	IK :Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	IK : Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	
	DO : Mengukur semua jenis laporan evaluasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	DO : Mengukur hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN terutama untuk honorarium pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa	

KEGIATAN

1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi penyusunan Raperda	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik**
IK : Jumlah Fasilitasi penyusunan RAPERDA	IK : Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi penyusunan Raperda	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik

1. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	3. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	4. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas DPRD**	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Tugas DPRD**	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
IK : Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	IK : Jumlah DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pendalaman tugas	IK : Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	IK Jumlah Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	IK : Jumlah Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
DO : Mengukur tingkat pencapaian fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	DO : Mengukur tingkat pencapaian fasilitasi Kapasitas DPRD	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Tugas DPRD	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
3. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				**3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses**
Sasaran SK : Terlaksananya fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				**Sasaran SK : Terlaksananya fasilitasi kegiatan Reses DPRD**
IK : Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang sosejahteraan rakyat				IK : Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses
DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat				DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reses DPRD
4. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				
Sasaran SK : Terlaksananya fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				
IK : Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian				
DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengawasan urusan pemerintahan bidang Perekonomian				
5. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				
Sasaran SK : Terlaksananya fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				
IK : Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam				
DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam				
6. Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				
Sasaran SK : Terlaksananya fasilitasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				
IK Jumlah dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				

1. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya publikasi melalui berbagai media	**1. Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD (honor Tenaga Ahli &Fraksi, Prog. Kerja)** **2. Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas layanan kehumasan (Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat)**
IK : Jumlah publikasi melalui berbagai media	1. IK Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD 2. IK : Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas layanan kehumasan
DO : Mengukur hasil pelaksanaan publikasi melalui berbagai media	1. DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD 2. DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas layanan kehumasan
	3. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
	Sasaran SK : Terlaksananya fasilitasi kegiatan Program Kerja DPRD
	IK : Jumlah dokumen rencana kerja DPRD
	DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi rencana kerja DPRD
	4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
	Sasaran SK : Terlaksananya fasilitasi kegiatan Hubungan Masyarakat
	IK : Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat
	DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan hubungan masyarakat

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	**Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**
IK : Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	IK : Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	IK : Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan
DO: Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal	DO : Mengukur hasil pelaksanaan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	DO : Mengukur kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan SOP yang berlaku
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Sasaran SK : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		
IK : Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		
DO : Mengukur penyediaan bahan bacaan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan kantor baik yang rutin setiap bulan maupun dalam satu tahun seperti penyediaan		
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Sasaran SK : Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah		
IK : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah		
DO : Mengukur penyediaan layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi lelembagaan perangkat daerah		
5. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Sasaran SK : Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah		
IK : Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah		
DO : Mengukur layanan penatausahaan arsip dinamis perangkat daerah		
6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Sasaran SK :Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu		
IK : Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Sasaran Kegiatan : Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang memiliki nilai aset	**Sasaran Kegiatan : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD**
IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	IK : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	IK : Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar
DO : Mengukur jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset yang disediakan oleh perangkat daerah	DO : Mengukur hasil dari penyediaan jasa penunjang jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	DO : Mengukur jumlah seluruh barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	DO : Mengukur tingkat layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar dalam satu tahun
3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	**3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel**	
Sasaran sk: Tersedianya mebel	**Sasaran SK : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	**Sasaran SK : Terlaksanannya pemeliharaan mebel**	
IK : Jumlah paket mebel yang disediakan	IK : Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	IK : Jumlah mebel yang dipelihara	
DO : Mengukur jumlah/jenis mebel perkantoran yang disediakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun	DO : Mengukur penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perangkat	DO : Mengukur jumlah mebel pada perangkat daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun	
4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	
Sasaran SK: Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	**Sasaran SK: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	**Sasaran SK : Terlaksanannya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya**	
IK : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	IK :Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	IK :Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
DO : Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pendukung kegiatan perangkat daerah yang disediakan (sesuai kebijakan pemerintah provinsi)	DO : Mengukur hasil dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah	DO : Mengukur jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dilakukan pemeliharaan secara rutin seperti pemeliharaan komputer,	
5. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		**5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	
Sasaran sk : Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		**Sasaran SK : Terlaksanannya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya**	
IK : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		IK : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
DO : Mengukur jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun (sesuai		DO : Mengukur jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya pada perangkat daerah yang direhabilitasi dalam satu tahun	

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD**
IK : Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	IK : Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	IK : iPersentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar
DO : Mengukur proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	DO : Mengukur hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah setiap ta	DO : Mengukur tingkat layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar dalam satu tahun

KEGIATAN																							
	1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	**2. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik**	**1. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**3. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	**4. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**1. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintho Daerah**	**7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi penyusunan Raperda	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas DPRD**	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Tugas DPRD**	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya publikasi melalui berbagai media**	**1. Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD (honor Tenaga Ahli &Fraksi, Prog. Kerja)** **2. Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas layanan kehumasan (Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat)**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset**	**Sasaran Kegiatan : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD**
	IK : Jumlah Fasilitasi penyusunan RAPERDA	IK : Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengewasan Kode Etik	IK : Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	IK : Jumlah DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pendalaman tugas	IK : Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	IK Jumlah Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	IK : Jumlah Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	IK : Jumlah publikasi melalui berbagai media	1. IK : Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD 2. IK : Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas layanan kehumasan	IK : Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	IK : Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	IK : Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	IK : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	IK : Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	IK : Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	IK : Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	IK : IPersentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar
	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi penyusunan Raperda	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	DO : Mengukur tingkat pencapaian fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	DO : Mengukur tingkat pencapaian fasilitasi Kapasitas DPRD	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Tugas DPRD	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	DO : Mengukur hasil pelaksanaan publikasi melalui berbagai media	1. DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD 2. DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas layanan kehumasan	DO: Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal	DO : Mengukur hasil pelaksanaan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	DO : Mengukur kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan SOP yang berlaku	DO : Mengukur jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset yang disediakan oleh perangkat daerah	DO : Mengukur hasil dari penyediaan jasa penunjang jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	DO : Mengukur jumlah seluruh barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	DO : Mengukur tingkat layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar dalam satu tahun	DO : Mengukur proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	DO : Mengukur hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah setiap tä	DO : Mengukur tingkat layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar dalam satu tahun
			DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan							DO : Mengukur layanan fasilitasi kunjungan tamu kelembagaan seperti akomodasi, transportasi dan lainnya											
			7. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Sasaran SK : Terlaksananya fasilitasi Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			IK : Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran																		

KEGIATAN

1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	**2. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik**
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi penyusunan Raperda	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik**
IK : Jumlah Fasilitasi penyusunan RAPERDA	IK : Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi penyusunan Raperda	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik

1. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**3. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	**4. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas DPRD**	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Tugas DPRD**	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
IK : Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	IK : Jumlah DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pendalaman tugas	IK : Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	IK :Jumlah Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	IK : Jumlah Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
DO : Mengukur tingkat pencapaian fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	DO : Mengukur tingkat pencapaian fasilitasi Kapasitas DPRD	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Tugas DPRD	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
DO : Mengukur hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengawasan Penggunaan Anggaran				

1. Kagiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	**2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya publikasi melalui berbagai media	**1. Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD (honor Tenaga Ahli &Fraksi, Prog. Kerja)** **2. Sasaran Kegiatan : Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas layanan kehumasan (Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat)**
IK : Jumlah publikasi melalui berbagai media	1. IK : Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD 2. IK : Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas layanan kehumasan
DO : Mengukur hasil pelaksanaan publikasi melalui berbagai media	1. DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD 2. DO : Mengukur hasil pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas layanan kehumasan

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthn Daerah**	**7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	**Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset**	**Sasaran Kegiatan : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD**
IK : Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	IK : Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	IK : Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	IK : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	IK : Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar
DO: Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal	DO : Mengukur hasil pelaksanaan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	DO : Mengukur kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan SOP yang berlaku	DO : Mengukur jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset yang disediakan oleh perangkat daerah	DO : Mengukur hasil dari penyediaan jasa penunjang jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	DO : Mengukur jumlah seluruh barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	DO : Mengukur tingkat layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar dalam satu tahun

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD**
IK : Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	IK : Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	IK : JPersentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar
DO : Mengukur proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	DO : Mengukur hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah setiap ta	DO : Mengukur tingkat layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar dalam satu tahun

IDENTIFIKASI RISIKO

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	Risiko Strategis OPD	Terwujudnya Hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (Survei Kepuasan DPRD)	Adanya miskomunikasi dalam melaksanakan pelayanan kedewanan	Resiko Operasional	Jadwal kegiatan dewan yang dinamis	Pelayanan kegiatan dewan tidak sesuai jadwal	DPRD, Setwan dan OPD
2	Risiko Strategis OPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang tersedia	Indeks kualitas sarana dan prasarana (Survei Kepuasan DPRD)	Sarana dan prasarana yang tersedia tidak sesuai dengan yang diinginkan	Resiko Operasional	Adanya permintaan yang belum terakomodir	Kepuasan pelayanan kedewanan menurun / rendah	Setwan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	Risiko Strategis OPD	Terwujudnya Hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (Survei Kepuasan DPRD)	Adanya miskomunikasi dalam melaksanakan pelayanan kedewanan	Resiko Operasional	Jadwal kegiatan dewan yang dinamis	Pelayanan kegiatan dewan tidak sesuai jadwal	DPRD, Setwan dan OPD
2	Risiko Strategis OPD	Meningkatnya Fasilitasi Publikasi Kedewanan	Indeks kemudahan akses publikasi di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Terjadinya kesalahan informasi / publikasi yang tidak lengkap	Resiko Operasional	Proses verifikasi informasi sebelum dipublikasikan tidak dilakukan dengan cermat	Menyebabkan misinformasi yang dapat membingungkan masyarakat / mengurangi kredibilitas dewan	Setwan, DPRD, masyarakat

ANALISIS RISIKO

Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
Adanya miskomunikasi dalam melaksanakan pelayanan kedewanan (SDM)	4	3	**12**	Ada	Membuka kanal komunikasi baik secara offline maupun online di setiap jenjang pimpinan baik DPRD maupun Sekretariat DPRD	Memadai	2	2	4
Sarana dan prasarana yang tersedia tidak sesuai dengan yang diinginkan	5	3	**15**	Ada	Pengadaan yang dilakukan sesuai dengan DPA disertai komunikasi melalui nota dinas	Belum Memadai	5	2	10

Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
Adanya miskomunikasi dalam melaksanakan pelayanan kedewanan (SDM)	4	3	**12**	Ada	Membuka kanal komunikasi baik secara offline maupun online di setiap jenjang pimpinan baik DPRD maupun Sekretariat DPRD	Memadai	2	2	4
Terjadinya kesalahan informasi / publikasi yang tidak lengkap	5	3	**15**	Ada	Setiap informasi yang akan dipublikasikan harus melalui proses verifikasi yang cermat serta menerapkan prosedur standar operasional yang jelas dan terstruktur	Belum Memadai	5	2	10

PENETAPAN RISIKO PRIORITAS

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Sarana dan prasarana yang tersedia tidak sesuai dengan yang diinginkan	10	Sekretaris DPRD	Adanya permintaan yang belum terakomodir	Kepuasan pelayanan kedewanan menurun / rendah

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Terjadinya kesalahan informasi / publikasi yang tidak lengkap	10	Sekretaris DPRD	Proses verifikasi informasi sebelum dipublikasikan tidak dilakukan dengan cermat	Menyebabkan misinformasi yang dapat membingungkan masyarakat / mengurangi kredibilitas dewan

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Tujuan PD	Indikator Kinerja PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Pelayanan Kedewanan	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Sarana dan prasarana yang tersedia tidak sesuai dengan yang diinginkan	10	Adanya permintaan yang belum terakomodir	Kepuasan pelayanan kedewanan menurun / rendah	komunikasi secara lisan melalui sosialisasi aturan	Sekretaris DPRD	2026
Meningkatnya Pelayanan Kedewanan	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Terjadinya kesalahan informasi / publikasi yang tidak lengkap	10	Proses verifikasi informasi sebelum dipublikasikan tidak dilakukan dengan cermat	Menyebabkan misinformasi yang dapat membingungkan masyarakat / mengurangi kredibilitas dewan	Setiap informasi yang akan dipublikasikan harus melalui proses verifikasi yang cermat serta menerapkan prosedur standar operasional yang jelas dan terstruktur	Setwan, DPRD, masyarakat	2026

INSPEKTORAT

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik *(clean and good government)*, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), diperlukan sistem pengawasan intern yang efektif dan berintegritas. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah, serta menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Secara substansi, penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, serta mengacu pada kebijakan nasional RPJMN 2025–2029. Penyesuaian terhadap dinamika global dan nasional, termasuk digitalisasi pengawasan, penguatan manajemen risiko, dan peningkatan kapabilitas APIP, menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pengawasan lima tahun ke depan. Dalam penyusunan Renstra ini juga telah mempertimbangkan keterkaitan arah kebijakan dan isu strategis dari dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dengan latar belakang tersebut, serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih dalam proses penetapan.

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan. Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tahapan: (1) **persiapan penyusunan**; (2) **penyusunan rancangan**; (3) **pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**; (4) **perumusan rancangan akhir**; dan (5) **penetapan** sesuai pada gambar 1.1 di bawah ini:

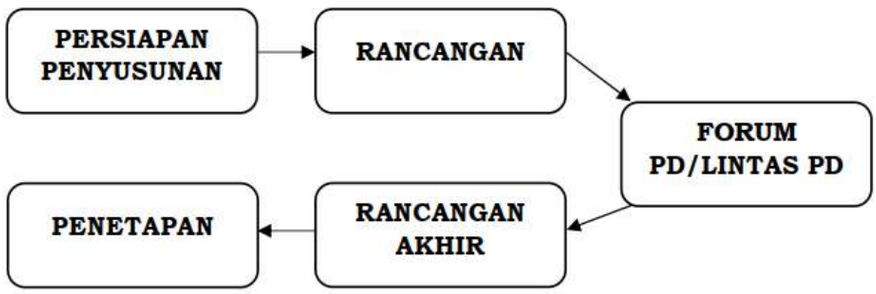

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Rencana Strategis
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan daerah, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan DPN Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
13. Peraturan Asosiasi Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Tujuan

   Menjadi pedoman Inspektur dalam:

   a. Menyusun rencana kerja Inspektorat yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
   b. Menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode 2025-2029;
   c. Menjabarkan arah kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
2.2 Sumberdaya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
2.4 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
2.5 Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
3.3 Manajemen Risiko Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan penguatan terhadap peran Inspektorat Daerah Provinsi selain melaksanakan peran pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya tetapi juga berperan untuk pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan amanat di atas, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
9. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah digambarkan sebagaimana di bawah ini:

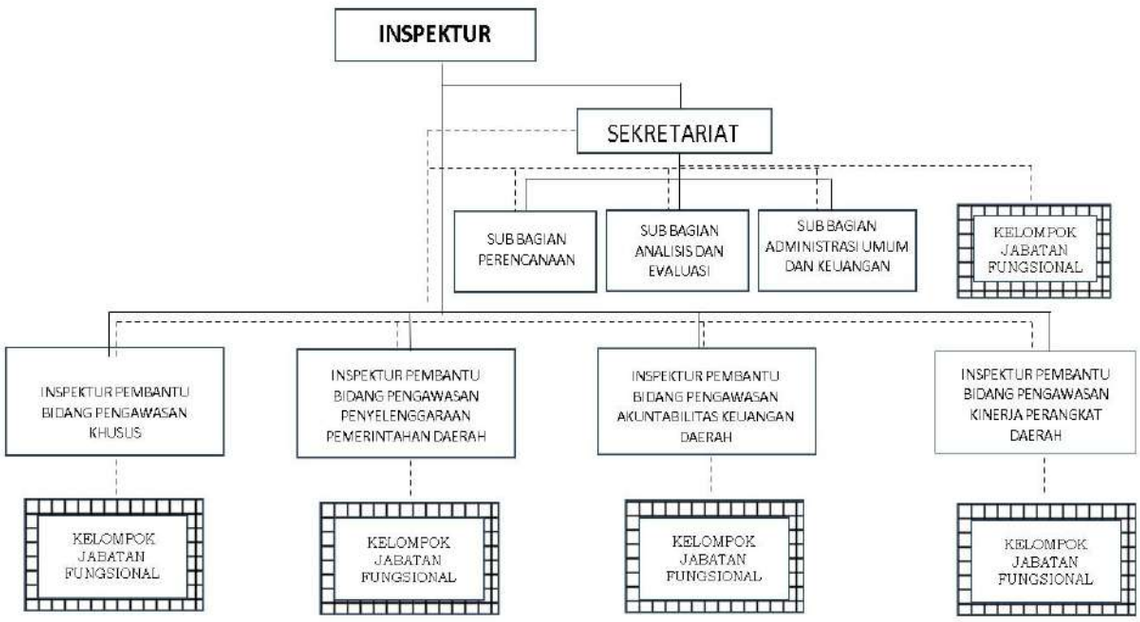

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

2.1.3 Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa susunan organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Inspektur

   Tugas Inspektur adalah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.
2. Sekretariat

   Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Tugas Sekretariat adalah melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

   Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat melaksanakan fungsi:
   a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
   b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;

c. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat;
d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
e. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
g. pengkoordinasian peningkatan kapabilitas APIP;
h. pengkoordinasian pencegahan korupsi; dan
i. pengkoordinasian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan memiliki tugas:

1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan;
2) menyiapkan bahan pengkoordinasian program pengawasan dan penganggaran;
3) menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Inspektorat;
4) menyusun bahan capaian dan pengendalian kinerja;
5) melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan;
6) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengusulan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

b. Subbagian Analisis dan Evaluasi;

Subbagian Analisis dan Evaluasi memiliki tugas:

1) menyiapkan bahan dan pendokumentasian pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
2) menyiapkan bahan administrasi pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
3) mengkoordinasikan evaluasi pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
4) menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
5) mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
6) melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
7) melaksanakan pengelolaan dan penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Inspektorat;
8) menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP;
9) menyusun laporan implementasi pengelolaan risiko di Lingkungan Inspektorat; dan
10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan memiliki tugas:

1) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
2) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
3) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
4) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
5) menyiapkan bahan pengelolaan kerjasama dan kehumasan;
6) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
7) menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
8) menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik;
9) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan pencegahan korupsi;
10) mengkoordinasikan pelaporan harta kekayaan ASN ;
11) mengkoordinasikan pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP;
12) mengkoordinasikan kegiatan keprofesian pengawasan intern; dan
13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus memiliki tugas:

a. menyiapkan bahan sosialisasi, fasilitasi pelaporan dan verifikasi laporan harta kekayaan ASN;
b. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
c. melaksanakan pengawasan atas aduan masyarakat;
d. melaksanakan pemeriksaan atas perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
e. melaksanakan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
f. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
g. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan laporan harta kekayaan ASN;
h. melaksanakan *probity audit*;
i. melaksanakan audit investigasi;
j. melaksanakan audit forensik;
k. melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah;
l. melaksanakan pengawasan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi atas pemenuhan indikator program dari KPK RI (*Monitoring, Controlling and Surveillance for Prevention* dan strategi nasional pencegahan korupsi dan/atau nama lain yang sejenis);

m. melaksanakan pemeriksaan khusus atas hambatan kelancaran pembangunan daerah; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki tugas:

a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
c. melaksanakan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah;
d. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
e. melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
f. melaksanakan reviu, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi;
g. melaksanakan evaluasi atas SAKIP Perangkat Daerah Provinsi;
h. melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten/Kota;
i. melaksanakan reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi;
j. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah;
k. melaksanakan asistensi, monitoring dan evaluasi atas penilaian mandiri penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah memiliki tugas:

a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
b. melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah atas penugasan dari Gubernur;
c. melaksanakan reviu rencana kerja dan anggaran (RKA) murni dan perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
d. melaksanakan reviu KUA-PPAS;
e. melaksanakan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);

f. melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
g. melaksanakan audit bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
h. melaksanakan pemantauan transfer dana desa;
i. melaksanakan asistensi, monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah memiliki tugas:

a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
b. melaksanakan audit kinerja program prioritas pemerintah daerah;
c. melaksanakan audit kinerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
d. melaksanakan audit kinerja BUMD;
e. melaksanakan audit kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
f. melaksanakan audit Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
g. melaksanakan pengawasan ASN berbasis meritokrasi; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut (data per 1 September 2025):

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan								**Jumlah**
SD	**SMP**	**SMA**	**D-III**	**D-IV**	**S-1**	**S-2**	**S-3**	
-	-	13	1	4	78	43	0	139

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
69	70	139

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Golongan

PNS																PPPK		
Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV				V	VII	IX
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d			
-	-	-	-	-	-	-	1	18	31	14	25	19	9	4	-	8	1	9

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Jabatan

Eselon			ASN				JFU Non ASN	Jumlah
II	III	IV	JF Auditor	JF PPUPD	JFU	PPPK		
0	4	3	55	32	27	12	6	139

Tabel 2.5

Jumlah Pejabat Fungsional Auditor
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Jenjang Auditor	Jumlah Auditor
1.	Auditor Madya	11
2.	Auditor Muda	18
3.	Auditor Pertama	26

Tabel 2.6

Jumlah PPUPD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Jenjang PPUPD	Jumlah PPUPD
1.	PPUPD Madya	12
2.	PPUPD Muda	6
3.	PPUPD Pertama	14

Tabel 2.7

Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Yang Telah Bersertifikat

No	Sertifikasi	Jumlah
1.	Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)	31
2.	*Certified Forensic Auditor* (CFrA)	18

3.	*Chartered Accountant* (CA)	12
4.	*Certified Risk Associate* (CRA)	12
5.	*Qualified Risk Management Analyst* (QRMA)	10
6.	*Qualified Risk Management Professional* (QRMP)	8
7.	*Certified Government Risk Assurance* (CGRA)	4
8.	*Fraud Management Risk Professional* (FMRP)	1
9.	*Certified Government Accounting Associate* (CGAA)	1

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi sarana prasarana yang dapat dipakai dan dalam kondisi rusak, antara lain:

Tabel 2.7

Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No.	Sarana/Prasarana	Kondisi Tahun 2025	Kondisi yang diinginkan tahun 2029
1.	Gedung	6.270 M^2	6.270 M^2
2.	Kendaraan Dinas a) Roda 4 b) Roda 2	 25 unit 11 unit	 32 unit 15 unit
3.	Komputer	79 unit	95 unit
4.	Printer	85 unit	97 unit
5.	Koneksi Internet	24 jam	24 jam
6.	LCD	21 unit	29 unit
7.	Laptop/Notebook	35 unit	95 unit
8	Scanner	21 unit	29 unit

***kondisi 2029 : data dari pengurus barang**

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Inspektorat

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dan/atau indikator kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Pencapaian kinerja tersebut akan tergambarkan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, bagaimana pelayanan Inspektorat telah dilaksanakan secara maksimal. Penjabaran target indikator Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mulai dari Tujuan, Sasaran hingga Program serta ketercapaiannya pada 5 (lima) tahun terakhir telah tertuang pada Tabel 2.8. Sementara Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dari 5 (lima) tahun terakhir tertuang dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	Tujuan																			
a	Level Kapabilitas APIP	Level	-	-	-	3	3	3	3	n/a	3	3	3	3	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a
b	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	-	-	-	3,20	3,30	3,18	3,19	n/a	2,85	3,12	3,27	3,46	n/a	91,94	94,55	102,83	108,00	n/a
2	Sasaran																			
a	Level pada tiga elemen: 1. Elemen Peran dan Layanan; 2. Elemen Praktik Profesional; 3. Elemen Struktur Tata Kelola.	Level	-	-	-	3	3	3	3	n/a	3	3	3	3	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a
b	Nilai pada unsur Nilai Maturitas SPIP: 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi dan Komunikasi; 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern	Nilai	-	-	-	3,10	3,20	3,30	3,18	3,19	2,85	3,12	3,27	3,46	n/a	91,94	94,55	102,83	108,00	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Program																			
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 - 2021																				
a	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																			
1)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah I	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
2)	Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah I	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a
3)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
4)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
5)	Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah II	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
6)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II	%	-	-	-	100,00	101,61	n/a	n/a	n/a	100,00	101,61	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
8)	Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah III	%	-	-	-	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a
9)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	104,84	n/a	n/a	n/a	100,00	104,84	n/a	n/a	n/a
10)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
11)	Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan	%	-	-	-	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a	100,00	0,00	n/a	n/a	n/a
12)	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
b	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																			
1)	Persentase APIP berlisensi nasional/ internasional	%	-	-	-	40,00	190,00	n/a	n/a	n/a	40,00	190,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
2)	Nilai Budaya Integritas	Nilai	-	-	-	80,00	92,49	n/a	n/a	n/a	85,93	92,49	n/a	n/a	n/a	107,41	100,00	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3)	Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas	Indeks	-	-	-	87,35	87,11	n/a	n/a	n/a	87,43	87,11	n/a	n/a	n/a	100,09	100,00	n/a	n/a	n/a
4)	Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko	%	-	-	-	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 - 2023																				
a	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																			
1)	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	-	-	-	n/a	n/a	85,00	85,00	n/a	n/a	n/a	127,06	95,41	n/a	n/a	n/a	149,48	112,25	n/a
2)	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus	%	-	-	-	n/a	n/a	85,00	85,00	n/a	n/a	n/a	112,50	162,50	n/a	n/a	n/a	132,35	191,18	n/a
3)	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	-	-	-	n/a	n/a	85,00	85,00	n/a	n/a	n/a	122,78	121,52	n/a	n/a	n/a	144,45	142,96	n/a
4)	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	-	-	-	n/a	n/a	85,00	85,00	n/a	n/a	n/a	114,81	121,87	n/a	n/a	n/a	135,07	143,38	n/a
5)	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	n/a	n/a	85,00	85,00	n/a	n/a	n/a	127,27	227,27	n/a	n/a	n/a	149,73	267,38	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
b	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																			
1)	Persentase jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi	%	-	-	-	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a
2)	Persentase Penerapan MR di OPD	%	-	-	-	n/a	n/a	10,00	100,00	n/a	n/a	n/a	10,00	100,00	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a
3)	Nilai *Self Assessment* RB Provinsi	Nilai	-	-	-	n/a	n/a	85,00	86,00	n/a	n/a	n/a	88,35	88,38	n/a	n/a	n/a	103,94	102,77	n/a
4)	Persentase Nilai MCP korsupgah	%	-	-	-	n/a	n/a	85,00	85,00	n/a	n/a	n/a	94,02	89,35	n/a	n/a	n/a	110,61	105,12	n/a
5)	Persentase Capaian Aksi Stranas PK	%	-	-	-	n/a	n/a	75,00	10,00	n/a	n/a	n/a	84,20	15,75	n/a	n/a	n/a	112,27	157,50	n/a
B	**Renstra PD Tahun 2024-2026**																			
1	Tujuan																			
a	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00
b	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	76,00	n/a	n/a	n/a	n/a	82,09	n/a	n/a	n/a	n/a	108,01
2	Sasaran																			
a	Level Kapabilitas APIP	Level	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
b	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	3	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00
3	Program																			
a	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																			
1)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	83,00	n/a	n/a	n/a	n/a	95,95	n/a	n/a	n/a	n/a	115,60
2)	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	85,00	n/a	n/a	n/a	n/a	83,05	n/a	n/a	n/a	n/a	97,71
3)	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	85,00	n/a	n/a	n/a	n/a	43,67	n/a	n/a	n/a	n/a	51,38
4)	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	85,00	n/a	n/a	n/a	n/a	59,31	n/a	n/a	n/a	n/a	69,78

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5)	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	85,00	n/a	n/a	n/a	n/a	68,14	n/a	n/a	n/a	n/a	80,16
b	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																			
1)	Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	20,41	n/a	n/a	n/a	n/a	40,82	n/a	n/a	n/a	n/a	200,00
2)	Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	10,20	n/a	n/a	n/a	n/a	18,37	n/a	n/a	n/a	n/a	180,10

Dari tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 di atas dapat dilihat Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Tahun 2024-2026. Pada rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 terdapat dua rentang waktu dalam penetapan indikator kinerja yaitu:

a. Rentang waktu tahun 2019 – 2021 terdapat 2 (dua) indikator tujuan, 2 (dua) indikator sasaran dan 16 (enam belas) indikator program yaitu:
    1. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah I;
    2. Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah I;
    3. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I;
    4. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II;
    5. Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah II;
    6. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II;
    7. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III;
    8. Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah III;
    9. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III;
    10. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya;
    11. Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan;
    12. Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan;
    13. Persentase APIP berlisensi nasional/ internasional;
    14. Nilai Budaya Integritas;
    15. Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas; dan
    16. Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko.
b. Rentang waktu tahun 2022 – 2023, terdapat perubahan indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah khususnya pada indikator kinerja program sehingga terdapat 2 (dua) indikator tujuan, 2 (dua) indikator sasaran dan 10 (sepuluh) indikator program yaitu sebagai berikut:
    1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
    2. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus;
    3. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    4. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
    5. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
    6. Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi;
    7. Persentase Penerapan MR di OPD;
    8. Nilai *Self Assessment* RB Provinsi;
    9. Persentase Nilai MCP korsupgah; dan
    10. Persentase Capaian Aksi Stranas PK.

    Perubahan tersebut dalam rangka menindaklanjuti adanya:
    a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan

usulan perubahan struktur organisasi dan tata Kelola yang semula berdasarkan kewilayahan yaitu Inspektur Pembantu Khusus, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III menjadi berdasarkan urusan yang terdiri dari Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah; dan Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah; dan

b. Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur program, kegiatan serta tambahan nomenklatur sub kegiatan yang berpengaruh pada penetapan indikator kinerja di level aktivitas yaitu pada kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam rangka perubahan cascading dan pohon kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maka terdapat perubahan indikator kinerja pada rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Perubahan tersebut menjadi 2 (dua) indikator tujuan, 2 (dua) indikator sasaran dan 7 (tujuh) indikator program antara lain:

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri;
2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu;
3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
5. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
6. Persentase perangkat daerah yang mendapat Manajemen Risiko Indeks (MRI) level 3;
7. Persentase perangkat daerah yang mendapat Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) level 3.

Berdasarkan Tabel 2.8 selama tahun 2020-2024 secara umum indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai target yang ditetapkan meskipun terjadi perubahan indikator pada kurun waktu tersebut. Berikut indikator kinerja yang tercapai pada akhir tahun 2024:

1. Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan target Level 3 dan capaian Level 3;
2. Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) dengan target 76,00 dan capaian 82,09;
3. Level Kapabilitas APIP dengan target Level 3 dan capaian Level 3;
4. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah dengan target Level 3 dan capaian Level 3;

5. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri dengan target 83,00% dan capaian 95,95%;
6. Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3 dengan target 20,41% dan capaian 40,82%; dan
7. Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3 dengan target 10,20% dan capaian 18,37%.

Faktor-faktor yang mendukung ketercapaian kinerja di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pendampingan SPIP dan manajemen risiko serta Reformasi Birokrasi kepada perangkat daerah;
2. Pemantauan TLHP BPK RI dan Itjen Kemendagri yang sudah terdigitalisasi;
3. Sudah ditindaklanjutinya rekomendasi terkait Kapabilitas APIP dari BPKP.

Namun demikian, terdapat indikator kinerja pada level program yang masih di bawah target, yaitu:

1. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu dengan target 85,00% dan capaian 83,05%;
2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target 85,00% dan capaian 43,67%;
3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah dengan target 85,00% dan capaian 59,31%;
4. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah dengan target 85,00% dan capaian 68,14%.

Faktor- faktor yang menghambat pencapaian indikator kinerja di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu yang lama untuk ditindaklanjuti;
2. Pelaksanaan monitoring TLHP belum memadai dengan aplikasi yang sudah dimiliki;
3. Penguatan SDM APIP belum optimal;
4. Nilai total anggaran pengawasan belum mencapai 0,3 % dari APBD;
5. Kekurangan SDM dalam pelaksanaan pengawasan.

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja	64.220.370	65.969.264	71.513.228	75.076.360	42.774.439	31.322.520	30.627.046	32.177.566	37.919.296	39.563.390	31.047.790	29.792.275	31.886.633	37.708.528	38.814.001	99,12	97,27	99,10	99,44	98,11	4,78	4,57
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.9 di atas menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.31.322.520.000,00 dan tahun 2021 menjadi sebesar Rp.30.627.046.000,00 akibat *refocusing* pada masa pandemi *Covid-19*. Untuk tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.32.177.566.000,00 dan selanjutnya pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar Rp.37.919.296.000,00 karena adanya usulan penggantian sarana prasarana kantor yaitu lift yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Untuk tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp.39.563.390.000,00.

Capaian penyerapan anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tergolong “sangat baik” dari tahun 2020 hingga 2024 dengan realisasi anggaran di atas 95%.

2.4 Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, dilakukan pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah, serta akar penyebabnya. Pemetaan ini menjadi penting karena dapat membantu mengidentifikasi titik lemah yang selama ini menghambat optimalisasi peran Inspektorat dalam mendukung kinerja pemerintah daerah.

Tabel 2.10

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengawasan belum optimal.	Hasil pengawasan belum memberikan dampak/nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.	Penyelenggaraan manajemen risiko Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah belum efektif menurunkan level risiko.
			Pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah belum membudayakan pemanfaatan informasi risiko untuk mengambil keputusan/kebijakan.
			Ukuran kinerja pemerintah daerah/perangkat daerah kurang menggambarkan kinerja sasaran strategis, sasaran program dan kegiatan, serta sebagian masih menggunakan indikator dari pihak ketiga (misalnya BPS).
			Kompetensi APIP belum mengikuti perkembangan keilmuan/pengetahuan teknis yang selalu berkembang.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Profesionalitas APIP belum sepenuhnya memenuhi standar pengawasan.
			Orientasi pengawasan masih di aktivitas *assurance*, belum optimal menjalankan peran konsultatif
		Pencegahan korupsi belum optimal	Belum seluruh rekomendasi selesai ditindaklanjuti untuk memperbaiki tata kelola, risiko, dan kepatuhan (GRC)
			Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan kurang optimal
			Pembangunan anti korupsi belum optimal

2.5 Isu Strategis Inspektorat

Isu strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mencakup kebutuhan penguatan pengawasan intern yang belum maksimal seiring transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, sehingga peran APIP dalam *advisory* serta mitigasi risiko masih rendah dan perlu menjadi perhatian bagi pemimpin daerah; terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan dukungan kelembagaan/regulasi yang belum memadai menambah tantangan dalam implementasi teknologi informasi (misalnya e-audit), riset foresight untuk kebijakan daerah, dan peningkatan kualitas tata kelola berbasis informasi; di samping itu, tantangan lain meliputi rendahnya efektivitas penerapan manajemen risiko, kebutuhan peningkatan kapasitas advisory dan *risk-based* audit, serta perlunya budaya integritas yang kuat, koordinasi antar lembaga yang lebih baik, dan penerapan sistem pengawasan internal yang terintegrasi untuk menjadikan APIP sebagai early warning system dalam mendeteksi penyimpangan dan mendukung reformasi birokrasi di tingkat daerah.

Tabel 2.11

Perumusan Isu Strategis Inspektorat

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Penguatan pengawasan intern pemerintah	Pengawasan belum memberikan dampak yang maksimal pada mitra/auditan dan belum dapat memberikan masukan kepada pemimpin daerah	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Peran auditor internal akan berkembang menjadi Strategic Advisory (Internal Audit Vision 2035 (IIA))	Ekspektasi Pemerintahan baru pada peran pengawasan internal: aspek stratejik, *insight* & *foresight* (AAIPI 2024)		Pengawasan bermanfaat memberikan wawasan baru yang strategis dan tinjauan ke depan dengan berbagai alternatif (*foresight*) untuk kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Daerah
Penguatan pengawasan intern pemerintah	Peran APIP dalam fungsi *advisory* dan mitigasi risiko belum optimal akibat keterbatasan sumber daya (5M)	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal	Standar Global Internal Audit 2024 menuntut auditor internal untuk memiliki kompetensi dalam	APIP membutuhkan dukungan kelembagaan, substansi, kompetensi,		Pengawasan bermanfaat memberikan wawasan baru yang strategis dan tinjauan ke

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
		daerah yang belum optimal	*advisory* dan *risk-based audit*, yang saat ini masih menjadi tantangan bagi APIP di Indonesia	serta regulasi (AAIPI 2024)		depan dengan berbagai alternatif (*foresight*) untuk kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Daerah
Pemanfaatan Infrastruktur teknologi informasi (e.g., sistem e-audit)	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kegiatan manajerial maupun kegiatan pengawasan belum optimal: - Sistem pengawasan berbasis teknologi belum terintegrasi - Belum ada kebijakan internal untuk mewajibkan penggunaan teknologi informasi	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Standar Global Internal Audit 2024 menuntut auditor internal untuk menerapkan teknologi informasi dalam audit intern dan kompetensi yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi tersebut	APIP membutuhkan dukungan kelembagaan, substansi, kompetensi, serta regulasi (AAIPI 2024)		Penerapan teknologi informasi (misalnya *e-audit*) dalam pengawasan intern

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan korupsi	Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik karena belum adanya roadmap pembangunan budaya integritas	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal			Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi (Laporan SPI 2024)	Peningkatan peran Inspektorat sebagai *early warning system* dalam mendeteksi penyimpangan
Peningkatan efektivitas pengendalian internal Pemprov Jateng	a. Implementasi manajemen risiko masih bersifat administratif sehingga belum dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal			Tren nilai SPIP Terintegrasi meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2024 tetapi masih ditemukan	Mendorong pengawas intern untuk menjadi *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	keputusan b. Rencana tindak pengendalian (RTP) yang dirancang belum sepenuhnya diimplementasikan dan belum sepenuhnya efektif menurunkan risiko	daerah yang belum optimal			adanya temuan berulang	berbagai permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi
Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Hasil survei kepuasan masyarakat belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pelayanan Inspektorat	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal		Arahan Presiden Prabowo terkait Reformasi Birokrasi: 1. Responsivitas Birokrasi 2. Reformasi Pelayanan Publik 3. Efektivitas Alokasi Anggaran 4. Pelayanan		Penguatan kelembagaan APIP dalam pencegahan korupsi dan pembangunan integritas

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
				Berbasis Teknologi 5. Pengelolaan SN 6. Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran 7. Percepatan Implementasi Kebijakan 8. Penguatan Koordinasi Antar lembaga		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 didasarkan pada hasil identifikasi isu strategis dan kesepakatan forum perangkat daerah. Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dijalankan. Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Inspektorat.

b. Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

1. Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Inspektorat;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Inspektorat.

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif												
			Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Angka	3,464	3,471	3,5	3,52	3,54	3,56	3,58	3,6	3,6
		Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal											
			Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,06	3,02	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8	4	4

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3	3,096	3,146	3,196	3,246	3,296	3,346	3,396	3,396
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di INSPEKTORAT												
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Angka	81,03	82,09	82,79	83,49	84,1	84,89	85,59	85,59	85,59
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di INSPEKTORAT											
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Angka	3,181	3,31	3,32	3,35	3,38	3,41	3,45	3,5	3,5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di INSPEKTORAT											
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Angka	88,5	84,25	84,75	85,25	85,75	86,25	86,75	87,25	87,25

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Strategi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang sistematis yang dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sedangkan arah kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah periode 2025 - 2029, maka telah dirumuskan 5 (lima) strategi dan 5 (lima) arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal	1. Menguatkan fondasi pengawasan;	Memperkuat kapasitas dasar APIP dan sistem pengawasan internal;
		2. Meningkatkan Profesionalisasi dan Relevansi Pengawasan;	Meningkatkan kapasitas dan relevansi APIP dalam memberikan *insight* untuk pengambilan keputusan strategis.
		3. Transformasi Digital Pengawasan;	Digitalisasi proses audit dan integrasi sistem pengawasan
		4. Pengawasan Kolaboratif dan Partisipatif;	Menguatkan budaya antikorupsi melalui kolaborasi multipihak dalam pendidikan antikorupsi bagi ASN dan pemerintah desa
		5. Konsolidasi Dampak & Arah Baru Pengawasan Proaktif	Memastikan keberlanjutan hasil pengawasan dan merancang transformasi pengawasan ke depan

Selain itu, disajikan pentahapan pembangunan yang dimaksudkan untuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Prioritas dalam setiap tahapan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pentahapan yang dimaksud disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Arah Kebijakan RPJMD				
Arah Kebijakan RPJMD **Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**	**Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**	**Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**	**Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**
Pentahapan RPJMD				
• penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan; • penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi didukung dengan peningkatan kapabilitas APIP;	• peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian berbasis risiko, serta integrasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi;	• peningkatan dan pemerataan pengembangan kompetensi serta internalisasi nilai anti korupsi dan integritas kepada seluruh penyelenggara pemerintahan; • peningkatan kepatuhan pengawasan dan pengendalian berbasis risiko serta upaya pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas sektor;	• pengembangan kompetensi diarahkan untuk menumbuhkan daya saing penyelenggara pemerintahan dengan mendorong kemudahan akses belajar dengan mengedepankan nilai-nilai anti korupsi; • penumbuhan kesadaran pengawasan dan pengendalian berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi;	• kompetensi penyelenggara pemerintahan yang dan nilai-nilai anti korupsi serta integritas; • pengawasan dan pengendalian berbasis risiko yang efektif, efisien serta bebas korupsi yang mendukung Tata Kelola Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan;
Aktivitas Prioritas Perangkat Daerah				
• Pemetaan kompetensi seluruh APIP (gap analysis) • Pelatihan dasar audit berbasis risiko, audit kepatuhan,	• Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengawasan • Penerapan mekanisme pengawasan tematik	• Implementasi pengawasan berbasis risiko untuk program strategis/prioritas daerah. • Penyusunan laporan	• Pengembangan dan penggunaan sistem audit elektronik • Pembuatan tampilan informasi pengawasan	• Evaluasi menyeluruh hasil pengawasan • Penyusunan roadmap pengawasan 2031–2035 berbasis risiko

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
dan audit kinerja • Pelatihan foresight dan analisis kebijakan • Uji sertifikasi bagi APIP • Revisi dan simplifikasi SOP pengawasan untuk memperjelas peran APIP di tiap jenis audit • Digitalisasi arsip dokumen pengawasan dan referensi regulasi	berbasis prioritas pembangunan daerah • Penyusunan PKPT dengan pendekatan risiko (Risk-Based Audit Planning)	pengawasan yang memberikan insight strategis kepada pengambil keputusan. • Evaluasi berkelanjutan terhadap dampak pengawasan dan feedback dari pengambil keputusan melalui analisis kinerja tindak lanjut pengawasan. • Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan APH, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK • Forum pengawasan antara APIP, APH, KPK, BPK, OPD, NGO, dan Masyarakat • Evaluasi pelaksanaan penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD dan BLUD • Evaluasi rencana aksi dan titik rawan kejadian korupsi	berbasis tema untuk memudahkan dalam melihat hasil pengawasan berdasarkan topik atau isu tertentu • Audit yang menggunakan data dan aplikasi untuk analisis	strategis daerah dan harapan publik

3.3 Manajemen Risiko Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya. Proses manajemen risiko seluruhnya dituangkan dalam lampiran Renstra PD. Sedangkan untuk rencana tindak pengendalian pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendaian yang efektif	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Nilai indeks SPIP menurun	15	Tim pemeriksa kurang adaptif atas perubahan regulasi atau standar penilaian SPIP dari BPKP	Perangkat daerah gagal menyesuaikan	Menyusun Juknis pelaksanaan PM SPIP tingkat Perangkat Daerah sebagai panduan Perangkat Daerah	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran								
Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	perolehan nilai IEPK tiap perangkat daerah dibawah 3	10	Belum efektifnya kegiatan pencegahan korupsi dan fraud di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Menurunnya reputasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	evaluasi atas pelaksanaan aturan/ pedoman teknis pengendalian korupsi melalui SPIP Terintegrasi	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030
Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal	Level Kapabilitas APIP	Rekomendasi hasil pemeriksaan tidak mampu memberikan *insight* dalam pengambilan keputusan	10	Hasil pengawasan disajikan dalam format panjang dan rumit, sulit dipahami pimpinan	Rekomendasi diabaikan atau hanya ditindaklanjuti secara administratif.	Penyusunan *exe cutive summary* hasil pengawasan untuk kepala daerah	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030
Tujuan								
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di INSPEKTORAT	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Inspektorat	Implementasi RB parsial dan tidak terintegrasi	15	RB dianggap hanya urusan sekertariat/ Inspektorat, bukan tanggungjawab semua	Indeks Reformasi Birokrasi tidak mencerminkan kondisi riil	Menyusun rencana aksi atas implementasi RB untuk dilaksanakan oleh semua unit kerja	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran								
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di INSPEKTORAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Ulasan negatif pelanggan di situs ulasan publik	10	Perilaku pegawai yang tidak sesuai NSPK ASN	Menurunnya kepercayaan masyarakat	Penerapan Whistleblowing System (WBS) internal untuk melaporkan pelanggaran perilaku	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di INSPEKTORAT	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Adanya risiko strategis yang tidak teridentifikasi	10	Kurangnya komitmen UPR dalam mengidentifikasi risiko	Berpotensi terjadi permasalahan yang tidak ada tindak pengendaliannya	Melakukan FGD dan brainstroming saat penyusunan Risk Register	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya selama periode tahun 2025 – 2029. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta yang kedua adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan tahun 2025 – 2029 akan melaksanakan 3 program, 12 kegiatan, dan 44 sub kegiatan yaitu:

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, yang terdiri atas:
   a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
   b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sub kegiatan sebagai berikut:
      1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
      2) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;
      3) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang terdiri atas:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan sebagai berikut:
      1) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota;
      2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
      3) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
      4) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
   b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri atas:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
      3) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;
      4) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   1) Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN;
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
   2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
   2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
   3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
   6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
   8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   2) Pengadaan Mebel;
   3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   4) Pengadaan Aset Tetap Lainnya; dan
   5) Pengadaan Aset Tak Berwujud.
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
   4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   2) Pemeliharaan Mebel;
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   4) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;

5) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penentuan secara lengkap program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.1.1 di bawah ini:

Tabel 4.1.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif *												8.524.520.000		8.524.520.000		9.524.520.000		13.829.520.000		17.154.520.000	INSPEKTORAT	
							Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi *	Angka	3,471	3,5	3,52		3,54		3,56		3,58		3,6		INSPEKTORAT	
	Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal **											8.524.520.000		8.524.520.000		9.524.520.000		13.829.520.000		17.154.520.000	INSPEKTORAT	
							Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) **	Angka	3,02	3,2	3,4	6.874.520.000	3,6	6.874.520.000	3,7	7.874.520.000	3,8	10.179.520.000	4	11.454.520.000	INSPEKTORAT	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ***									240.000.000		240.000.000		240.000.000		320.000.000		420.000.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti ***	%	95,79	95,79	96,23	240.000.000	96,58	240.000.000	96,82	240.000.000	97	320.000.000	97,1	420.000.000	INSPEKTORAT	
		6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal ****								240.000.000		240.000.000		240.000.000		320.000.000		420.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Kajian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Auditi dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Kajian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan ****	Dokumen	N/A	N/A	14	240.000.000	14	240.000.000	14	240.000.000	14	320.000.000	14	420.000.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.02.1.01.0007			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP *****							240.000.000		240.000.000		240.000.000		320.000.000		420.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Dokumen	70	70	92	240.000.000	92	240.000.000	92	240.000.000	92	320.000.000	92	420.000.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	INSPEKTORAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pemeriksaan APIP	Pemeriksaan APIP *****															
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ***									1.495.940.000		1.495.940.000		1.745.940.000		2.245.940.000		2.495.940.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
						Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang akuntabilitas keuangan daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah ***	%	N/A	N/A	100	1.495.940.000	100	1.495.940.000	100	1.745.940.000	100	2.245.940.000	100	2.495.940.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal ****								1.495.940.000		1.495.940.000		1.745.940.000		2.245.940.000		2.495.940.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
						Tersedianya berita acara pengawasan yang meliputi kesepakatan temuan,	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan,	Dokumen	N/A	N/A	100	1.495.940.000	100	1.495.940.000	100	1.745.940.000	100	2.245.940.000	100	2.495.940.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						rekomendasi, dan rencana aksi	rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang terbit ****														KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.00002			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah *****							1.495.940.000		1.495.940.000		1.745.940.000		2.245.940.000		2.495.940.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
						Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah *****	Laporan	42	42	80	1.495.940.000	80	1.495.940.000	80	1.745.940.000	80	2.245.940.000	80	2.495.940.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ***									1.296.020.000		1.296.020.000		1.546.020.000		2.046.020.000		2.296.020.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan khusus	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus ***	%	N/A	N/A	100	1.296.020.000	100	1.296.020.000	100	1.546.020.000	100	2.046.020.000	100	2.296.020.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
		6.01.02.1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu ****								1.296.020.000		1.296.020.000		1.546.020.000		2.046.020.000		2.296.020.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
						Tersedianya berita acara pengawasan yang meliputi kesepakatan temuan, rekomendasi, dan rencana aksi	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi bidang Pengawasan Khusus yang terbit ****	Dokumen	N/A	N/A	23	1.296.020.000	23	1.296.020.000	23	1.546.020.000	23	2.046.020.000	23	2.296.020.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
		6.01.02.1.02.0002			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu *****							1.296.020.000		1.296.020.000		1.546.020.000		2.046.020.000		2.296.020.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
						Terlaksananya Pengawasan dengan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan	Laporan	24	20	23	1.296.020.000	23	1.296.020.000	23	1.546.020.000	23	2.046.020.000	23	2.296.020.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	INSPEKTUR PEMBANTU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tujuan Tertentu	Tertentu *****															BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ***									1.877.120.000		1.877.120.000		2.127.120.000		2.627.120.000		2.877.120.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
						Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ***	%	N/A	N/A	100	1.877.120.000	100	1.877.120.000	100	2.127.120.000	100	2.627.120.000	100	2.877.120.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal ****								1.877.120.000		1.877.120.000		2.127.120.000		2.627.120.000		2.877.120.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya berita acara pengawasan yang meliputi kesepakatan temuan, rekomendasi, dan rencana aksi	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbit ****	Dokumen	N/A	N/A	64	1.877.120.000	64	1.877.120.000	64	2.127.120.000	64	2.627.120.000	64	2.877.120.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.0005			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota *****							1.877.120.000		1.877.120.000		2.127.120.000		2.627.120.000		2.877.120.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
						Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota *****	Laporan	30	30	100	1.877.120.000	100	1.877.120.000	100	2.127.120.000	100	2.627.120.000	100	2.877.120.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						DAERAH
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ***									1.890.440.000		1.890.440.000		2.140.440.000		2.640.440.000		2.890.440.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
						Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan kinerja perangkat daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah ***	%	N/A	N/A	100	1.890.440.000	100	1.890.440.000	100	2.140.440.000	100	2.640.440.000	100	2.890.440.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
		6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal ****								1.890.440.000		1.890.440.000		2.140.440.000		2.640.440.000		2.890.440.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
						Tersedianya berita acara pengawasan yang meliputi kesepakatan temuan, rekomendasi, dan rencana aksi	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan	Dokumen	N/A	N/A	80	1.890.440.000	80	1.890.440.000	80	2.140.440.000	80	2.640.440.000	80	2.890.440.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Kinerja Perangkat Daerah yang terbit ****																
		6.01.02.1.01.0001			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah *****							1.890.440.000		1.890.440.000		2.140.440.000		2.640.440.000		2.890.440.000		INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
						Terlaksanaya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah *****	Laporan	50	50	64	1.890.440.000	64	1.890.440.000	64	2.140.440.000	64	2.640.440.000	64	2.890.440.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI ***									75.000.000		75.000.000		75.000.000		300.000.000		475.000.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT ***	%	N/A	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	300.000.000	100	475.000.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan ****								75.000.000		75.000.000		75.000.000		300.000.000		475.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko ****	Dokumen	1	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	300.000.000	1	475.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.01.0002			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		300.000.000		475.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksanannya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun *****	Rekomendasi	N/A	N/A	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	300.000.000	1	475.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	INSPEKTORAT
							Indeks Efektivitas Pengendalia	Angka	3,096	3,146	3,196	1.650.000.000	3,246	1.650.000.000	3,296	1.650.000.000	3,346	3.650.000.000	3,396	5.700.000.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							n Korupsi (IEPK) **															
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI ***									1.650.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000		3.650.000.000		5.700.000.000	INSPEKTORAT	
						Meningkatnya kapabilitas pengelolaan pengendalian korupsi di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan IEPK level 3 ***	%	N/A	35,71	35,71	950.000.000	42,86	950.000.000	50	950.000.000	57,14	2.000.000.000	64,29	3.000.000.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi ****								950.000.000		950.000.000		950.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersusunnya laporan pengendalian korupsi di perangkat daerah	Jumlah laporan pengendalian korupsi di perangkat daerah ****	Laporan	N/A	3	3	950.000.000	3	950.000.000	3	950.000.000	3	2.000.000.000	3	3.000.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		6.01.03.1.02.0003			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi *****							950.000.000		950.000.000		950.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Kegiatan	N/A	9	9	950.000.000	9	950.000.000	9	950.000.000	9	2.000.000.000	9	3.000.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	INSPEKTORAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pemberantasan Korupsi	dan Pemberantasan Korupsi *****															
						Meningkatnya penguatan integritas di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat Zona Integritas ***	%	N/A	42,85	42,85	350.000.000	52,38	350.000.000	69,05	350.000.000	76,19	400.000.000	100	450.000.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi ****								350.000.000		350.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersusunnya laporan hasil evaluasi pengajuan ZI OPD dan BLUD	Jumlah laporan hasil evaluasi pengajuan Zona Integritas OPD dan BLUD ****	Laporan	N/A	8	8	350.000.000	8	350.000.000	8	350.000.000	8	400.000.000	8	450.000.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.03.1.02.0004			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas *****							350.000.000		350.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas *****	Perangkat Daerah	N/A	8	8	350.000.000	8	350.000.000	8	350.000.000	8	400.000.000	8	450.000.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	INSPEKTORAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya penguatan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80 ***	%	N/A	61,9	61,9	350.000.000	69,05	350.000.000	76,19	350.000.000	83,33	1.250.000.000	90,48	2.250.000.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi ****								350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.250.000.000		2.250.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersusunnya laporan pendampingan da0tau evaluasi pengelolaan risiko dan reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah laporan pendampingan da0tau evaluasi pengelolaan risiko dan reformasi birokrasi perangkat daerah ****	Laporan	N/A	84	84	350.000.000	84	350.000.000	84	350.000.000	84	1.250.000.000	84	2.250.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.02.0002			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi *****							350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.250.000.000		2.250.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi *****	Perangkat Daerah	N/A	42	42	350.000.000	42	350.000.000	42	350.000.000	42	1.250.000.000	42	2.250.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	INSPEKTORAT
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat												31.323.014.000		31.72		35.233.790.000		43.574.305.000		46.296.707.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
daerah berintegritas dan dinamis di INSPEKTORAT *														1.490.000								
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah INSPEKTORAT *	Angka	82,09	82,79	83,49		84,1		84,89		85,59		85,59		INSPEKTORAT	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di INSPEKTORAT **											208.334.000		208.334.000		208.334.000		705.000.000		795.000.000	INSPEKTORAT	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah INSPEKTORAT **	Angka	3,31	3,32	3,35	208.334.000	3,38	208.334.000	3,41	208.334.000	3,45	705.000.000	3,5	795.000.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									208.334.000		208.334.000		208.334.000		705.000.000		795.000.000	INSPEKTORAT	
						Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di INSPEKTORAT	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah INSPEKTORAT ***	%	N/A	100	100	208.334.000	100	208.334.000	100	208.334.000	100	705.000.000	100	795.000.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja								208.334.000		208.3		208.334.000		705.000.000		795.000.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Perangkat Daerah ****										34.000								
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	N/A	100	100	208.334.000	100	208.334.000	100	208.334.000	100	705.000.000	100	795.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		X.XX.01.1.01.00001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							83.334.000		83.334.000		83.334.000		500.000.000		550.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	6	9	9	83.334.000	9	83.334.000	9	83.334.000	9	500.000.000	9	550.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.00007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							45.000.000		45.000.000		45.000.000		125.000.000		165.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	2	2	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	125.000.000	2	165.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.00008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	4	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	INSPEKTORAT
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	INSPEKTORAT	
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	INSPEKTORAT
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di INSPEKTORAT **											31.114.680.000		31.513.156.000		35.025.456.000		42.869.305.000		45.501.707.000	INSPEKTORAT	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah INSPEKTORAT **	Angka	84,25	84,75	85,25	31.114.680.000	85,75	31.513.156.000	86,25	35.025.456.000	86,75	42.869.305.000	87,25	45.501.707.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									31.114.680.000		31.513.156.000		35.025.456.000		42.869.305.000		45.501.707.000	INSPEKTORAT	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di INSPEKTORAT	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT ***	%	N/A	100	100	31.114.680.000	100	31.513.156.000	100	35.025.456.000	100	42.869.305.000	100	45.501.707.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								24.542.857.000		24.742.857.000		24.842.857.000		30.199.305.000		31.050.000.000	INSPEKTORAT	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	2	2	24.542.857.000	2	24.742.857.000	2	24.842.857.000	2	30.199.305.000	2	31.050.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							24.522.857.000		24.722.857.000		24.822.857.000		30.149.305.000		31.000.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/ Bulan	138	139	139	24.522.857.000	139	24.722.857.000	139	24.822.857.000	139	30.149.305.000	139	31.000.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Akhir Tahun SKPD *****																	
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								350.000.000		350.000.000		350.000.000		450.000.000		550.000.000	INSPEKTORAT	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	2	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	450.000.000	2	550.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		220.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	220.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.03.00 02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							250.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		330.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	330.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								605.000.000		605.000.000		852.599.000		1.340.000.000		1.582.500.000	INSPEKTORAT	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	N/A	100	100	605.000.000	100	605.000.000	100	852.599.000	100	1.340.000.000	100	1.582.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05.00 02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.			Pendataan dan Pengolahan Administrasi							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		42.500.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		05.0003			Kepegawaian *****																	
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	1	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	42.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							565.000.000		565.000.000		712.599.000		1.000.000.000		1.100.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	50	50	40	565.000.000	40	565.000.000	40	712.599.000	40	1.000.000.000	40	1.100.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		100.000.000		300.000.000		440.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	N/A	0	0	N/A	0	160	100.000.000	160	300.000.000	160	440.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								1.590.000.000		1.590.000.000		2.010.000.000		2.460.000.000		3.040.000.000	INSPEKTORAT	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	100	1.590.000.000	100	1.590.000.000	100	2.010.000.000	100	2.460.000.000	100	3.040.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		110.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.00 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							250.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	1	450.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.00 05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		160.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.00 06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							350.000.000		350.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	350.000.000	1	350.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							480.000.000		480.000.000		600.000.000		600.000.000		800.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	480.000.000	1	480.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	800.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							50.000.000		50.000.000		200.000.000		500.000.000		660.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	1	500.000.000	1	660.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								250.000.000		250.000.000		2.600.000.000		3.150.000.000		3.510.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	6	6	250.000.000	6	250.000.000	6	2.600.000.000	6	3.150.000.000	5	3.510.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.07.00002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		1.500.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	2	N/A	N/A	0	N/A	0	3	1.500.000.000	4	2.000.000.000	4	2.200.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.00005			Pengadaan Mebel *****							50.000.000		50.000.000		250.000.000		200.000.000		220.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.00 06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							100.000.000		100.000.000		500.000.000		500.000.000		550.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	2	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.00 07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							100.000.000		100.000.000		250.000.000		250.000.000		270.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	270.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.00 08			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		100.000.000		200.000.000		270.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	1	200.000.000	1	270.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								2.220.000.000		2.270.000.000		2.270.000.000		2.620.000.000		2.926.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya jasa penunjang urusan	Jumlah laporan penyediaan jasa	Laporan	N/A	4	4	2.220.000.000	4	2.270	4	2.270.000.000	4	2.620.000.000	4	2.926.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****							.000.000							DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							550.000.000		600.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	550.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	1	800.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		21.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Laporan	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	21.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****														DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.850.000.000		2.050.000.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	1.600.000.000	1	1.600.000.000	1	1.600.000.000	1	1.850.000.000	1	2.050.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.556.823.000		1.705.299.000		2.100.000.000		2.650.000.000		2.843.207.000	INSPEKTORAT	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	136	136	136	1.556.823.000	136	1.705.299.000	136	2.100.000.000	136	2.650.000.000	136	2.843.207.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas							600.000.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000		800.000.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Operasional atau Lapangan *****																	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	23	23	23	600.000.000	23	650.000.000	23	700.000.000	23	700.000.000	23	800.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.00 05			Pemeliharaan Mebel *****							50.000.000		50.000.000		100.000.000		200.000.000		233.207.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	7	7	7	50.000.000	7	50.000.000	7	100.000.000	7	200.000.000	7	233.207.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.00 06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							175.000.000		175.000.000		200.000.000		300.000.000		325.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	50	50	50	175.000.000	50	175.000.000	50	200.000.000	50	300.000.000	50	325.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.00 07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							75.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	50	50	75.000.000	50	75.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	110.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		100.000.000		125.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	100.000.000	2	125.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							500.000.000		550.000.000		750.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	750.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							156.823.000		205.299.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	INSPEKTORAT	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Unit	N/A	1	1	156.823.000	1	205.299.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****															DAN KEUANGAN	

Adapun uraian sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung program prioritas daerah dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.2

Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Output*/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
I	**Program Intervensi**					
	1. Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Evaluasi Zona Integritas	Predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Target 2026 : 8 Perangkat Daerah Target 2027 : 8 Perangkat Daerah Target 2028 : 8 Perangkat Daerah Target 2029 : 8 Perangkat Daerah Target 2030 : 8 Perangkat Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi melalui Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.	Inspektorat	1. Biro Organisasi 2. BKD
	1. Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat	Analisis peta jabatan dan usulan formasi jabatan: 1. Usulan formasi jabatan yang disampaikan ke Badan	Usulan Formasi Jabatan : Target 2026 : 1 dokumen Target 2027 : 1 dokumen Target 2028 : 1 dokumen Target 2029 : 1 dokumen Target 2030 : 1 dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah melalui sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Inspektorat	1. Biro Organisasi 2. BKD

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Output*/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
	Provinsi sampai tingkat Desa	Kepegawaian Daerah 2. Revisi peta jabatan yang disampaikan ke Biro Organisasi	Usulan Peta Jabatan : Target 2026 : 1 dokumen Target 2027 : 1 dokumen Target 2028 : 1 dokumen Target 2029 : 1 dokumen Target 2030 : 1 dokumen Target 2030 : 1 dokumen			
		Pengembangan SIMWAS dengan SIMWAS Dumas dan e-audit	Pengintegrasian SIMWAS TL dengan SIMWAS Dumas dan e-audit Target 2026 : 1 Unit Target 2030 : 1 Unit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.	Inspektorat	Dinkominfo
II	**Program Aksi**					
1.	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan	1. Pembuatan MOOC Anti Korupsi bekerjasama dengan BPSDMD	Target 2026 : 1 Dokumen	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Inspektorat	BPSDMD

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Output*/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
	Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK			serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.		
		2. Sosialisasi Anti Korupsi untuk ASN;	Target 2026 : 8 OPD Target 2027 : 8 OPD Target 2028 : 8 OPD Target 2029 : 8 OPD Target 2030 : 8 OPD		Inspektorat	BPSDMD
		3. Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar SMA, SMK.	Target 2026 : 24 SMA/SMK Target 2027 : 24 SMA/SMK Target 2028 : 24 SMA/SMK Target 2029 : 24 SMA/SMK Target 2030 : 24 SMA/SMK		Inspektorat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Bab ini memuat indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditampilkan dalam tabel 4.2.1 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tabel 4.2.2 di bawah ini:

Tabel 4.2.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	*Baseline* Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	3	3,47	3,50	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60	
2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah INSPEKTORAT	81,03	82,09	82,79	83,49	84,1	84,89	85,59	85,59	
3.	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3,06	3,02	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8	4,0	
4.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	3,096	3,146	3,196	3,246	3,296	3,346	3,396	

Pada tabel 4.2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 – 2029 mempunyai empat indikator kinerja utama yang akan mendukung sasaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.2
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	*Baseline* Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	

Pada tabel 4.2.2 menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) indikator kinerja kunci hasil (*outcome*) pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Tingkat Maturitas SPIP dan Kualitas APIP dinilai dengan satuan level berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) yang dikeluarkan BPKP.

Selain IKU dan IKK, juga ditetapkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu Pendidikan; Kesehatan; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Sosial; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR); Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bukan termasuk perangkat daerah yang terkait 6 (enam) urusan wajib dasar tersebut sehingga pada tabel dibawah dijelaskan dengan keterangan nihil.

Tabel 4.2.3
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja SPM	*Baseline* Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			N I H I L							

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan mulai dari Tahun 2025 sampai dengan 2029.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan melakukan upaya optimal untuk mendukung visi dan misi Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Melalui rumusan Rencana Strategis ini Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah mempersiapkan diri untuk berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Bila nantinya alokasi anggaran tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan dalam Renstra ini, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan melakukan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat mengajukan perubahan anggaran melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku, guna memastikan kesinambungan pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal dan tetap sejalan dengan arah kebijakan strategis daerah.

Terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi pengawasan intern yang efektif dan berkualitas dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
2. Akselerasi transformasi digital pengawasan seiring berkembangnya teknologi informasi.
3. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan cara meningkatkan kompetensi SDM pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi jabatan fungsional auditor, serta penataan organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong profesionalisme dan kualitas hasil pengawasan.
4. Sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder pengawasan dengan cara meningkatkan kerja sama yang harmonis dengan BPK, BPKP, KPK, Ombudsman, serta masyarakat melalui forum-forum koordinasi pengawasan dan pelibatan publik.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan, sekaligus perbaikan pada dokumen perencanaan berikutnya.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai dasar integritas dan profesionalisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pengawasan.

Demikian, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN 1. POHON KINERJA

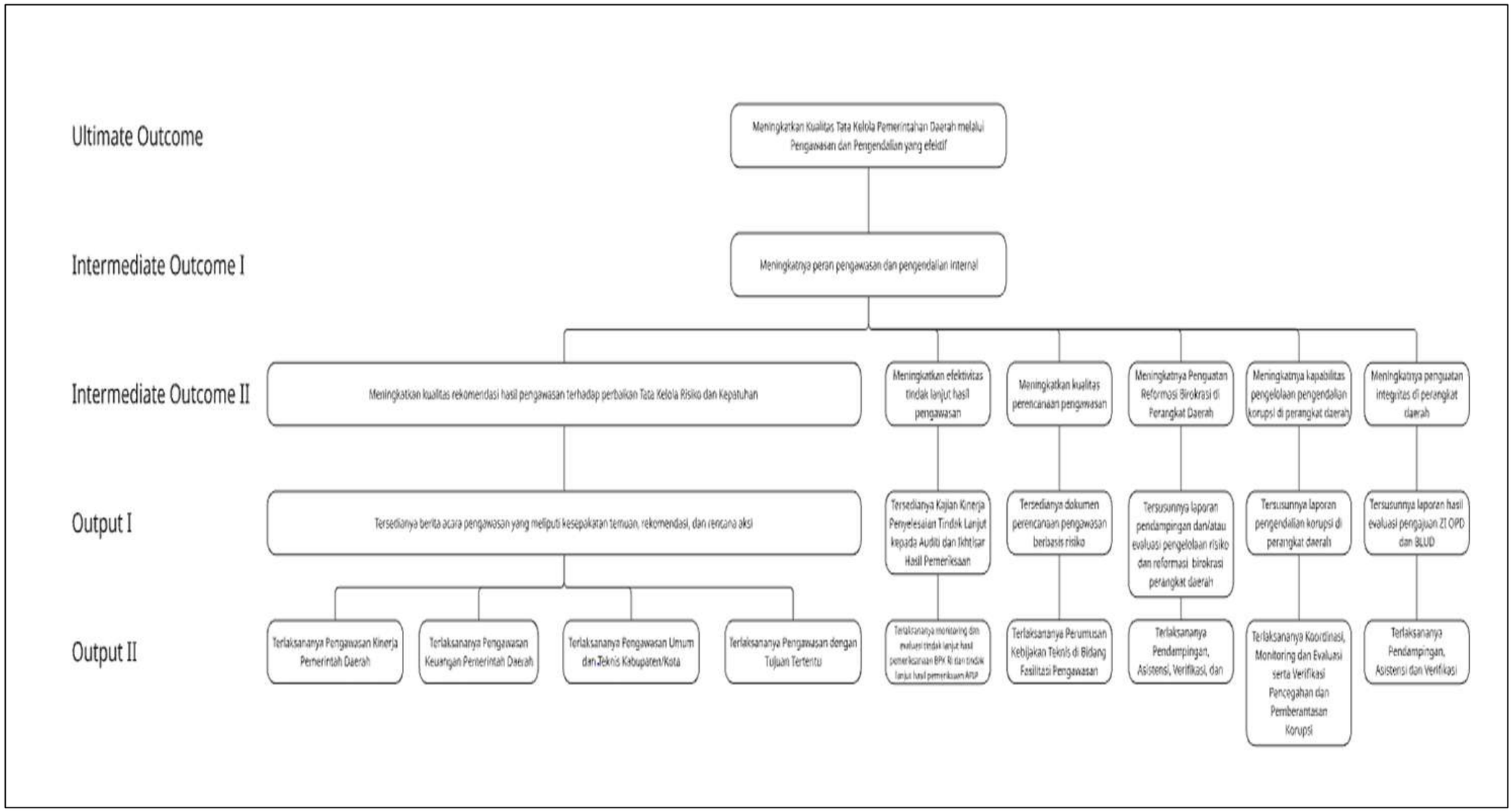

LAMPIRAN 2. CASCADING

Tujuan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif								
Indikator Kinerja	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi								
Sasaran	Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal								
Indikator Kinerja	Level Kapabilitas APIP						Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi		
Program	Program Penyelenggaraan Pengawasan					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi			
Indikator Kinerja	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80	Persentase OPD yang mendapatkan IEPK level 3	Persentase OPD yang memperoleh predikat Zona Integritas
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Pendampingan dan Asistensi		
Indikator Kinerja	Jumlah Dokumen Kajian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbit	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang terbit	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang terbit	Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi bidang Pengawasan Khusus yang terbit	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Jumlah laporan pendampingan dan/atau evaluasi pengelolaan risiko dan reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah laporan pengendalian korupsi di perangkat daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi pengajuan Zona Integritas OPD dan BLUD
Sub Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Indikator Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Unit Kerja	Subbag Analisis dan Evaluasi	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Inspekur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus	Subbag Perencanaan	Subbag Perencanaan dan Subbag Analisis&Evaluasi	Subbag Administrasi Umum&Keuangan dan Subbag Analisis&Evaluasi	Subbag Analisis dan Evaluasi

Tujuan	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis								
Indikator Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								
Sasaran	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah						
Indikator Kinerja	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah						
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
Indikator Kinerja	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah						
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan		
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Unit Kerja	Subbag Perencanaan	Subbag Analisis dan Evaluasi	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan

Tujuan	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis							
Indikator Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah							
Indikator Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah							
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
Indikator Kinerja	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah							
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Indikator Kinerja	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan							
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Indikator Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Unit Kerja	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan

Tujuan	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis														
Indikator Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah														
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah														
Indikator Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah														
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
Indikator Kinerja	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah														
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Indikator Kinerja	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan					
Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Mebel	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Unit Kerja	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan

LAMPIRAN 3.Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Perencanaan yang berbasis risiko menjadi hal penting agar sejak awal perencanaan, perangkat daerah sudah dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang, dan sudah dilakukan upaya mitigasi sejak awal. Oleh karena itu dalam menyusun Renstra PD, manajemen risiko menjadi proses yang terintegrasi dan dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Renstra PD. Kertas kerja manajemen risiko harus dilampirkan dalam dokumen Renstra PD, terutama risiko strategis perangkat daerah. Proses manajemen risiko berdasarkan pada Pergub Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a. Identifikasi Risiko

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah												
Sasaran Strategis		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)											

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah										
Sasaran Strategis				Indeks Kepuasan Masyarakat									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
Sasaran Program						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			Pegawai memberikan pelayanan yang tidak sesuai SOP	Risiko Fraud	keterlambatan dalam melakukan administrasi	Adanya keluhan oleh pegawai dan pengguna layanan	Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan penggun

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													a layanan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Sasaran Kegiatan								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Selisih perhitungan gaji pegawai	Risiko Operasional	Ketidaktelitian administrasi	Kurang bayar gaji pegawai	Pegawai Inspektorat Prov. Jateng
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Sasaran Kegiatan								Jumlah jenis dokumen administrasi barang	Penunggakan premi asuransi barang milik daerah	Risiko Operasional	Kurang tertibnya administrasi	Tidak semua semua barang milik	Inspektorat Prov. Jateng

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								milik daerah pada perangkat daerah				daerah dapat terpenuhi asuransi	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Sasaran Kegiatan								Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Potensi tertundanya pelaksanaan Bimtek/PKS	Risiko Operasional	Penentuan Jadwal dan Peserta yang berbenturan dengan jadwal penugasan	Tidak terpenuhinya target peserta	Pegawai Inspektorat Prov. Jateng
							Administrasi Umum Perangkat Daerah						

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Kegiatan								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Meningkatnya jumlah kunjungan studi banding dari pihak luar	Risiko Operasional	Meningkatnya apresiasi pihak luar terhadap kinerja Inspektorat	Anggaran makan minum yang ada tidak dapat mencukupi kebutuhan	Inspektorat Prov. Jateng, pelaku kunjungan
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Sasaran Kegiatan								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pendistribusian barang tidak dilakukan sesuai kebutuhan	Risiko Operasional	Perencanaan kebutuhan yang tidak tepat	Pembagian barang operasional tidak merata	Inspektorat Prov. Jateng

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Sasaran Kegiatan								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Surat hilang dan tidak terlacak	Risiko Operasional	Surat tidak didokumentasikan dalam sistem	Informasi dalam surat tidak tersampikan pada pihak yang dituju	Internal dan ekstenal Inspektorat Prov. Jateng
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Kegiatan								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pembiayaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas terlambat	Risiko Operasional	Kurang tertibnya administrasi	Kendaraan tidak bisa digunakan untuk melaksanakan tugas	Inspektorat Prov. Jateng
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah										
Sasaran Strategis				Indeks Manajemen Risiko									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					DAERAH PROVINSI								
Sasaran Program						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah			Penyajian data kinerja tidak dapat dipertanggungjawabkan	Risiko Operasional	Kurang validnya data dukung kinerja	Tidak terukurnya capaian kinerja	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sasaran Kegiatan								Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	Risiko Operasional	Keterbatasan sumber daya	Tidak dapat dijalankan kegiatan dan evaluasi dengan baik	Inspektorat Prov. Jateng

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								perundangan					
	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi												
Sasaran Strategis		Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi							Terjadinya korupsi dan fraud di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Risiko Fraud	Belum efektifnya kegiatan pencegahan korupsi dan fraud di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Menurunnya reputasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pemda

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah										
Sasaran Strategis				Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah					Penyelenggaraan MR masih sekedar pemenuhan dokumen	Risiko Strategis	Kurangnya komitmen pemilik risiko dalam menerapkan MR	Entitas tidak dapat memitigasi risiko yang dimiliki	OPD
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Program						Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3			Tindakan pencegahan tidak terstruktur	Risiko Kepatuhan	Perangkat daerah belum memiliki aturan/pedoman teknis pengendalian korupsi	Skor IEPK tidak mencapai level 3	Pemda
							Pendampingan dan Asistensi						
Sasaran Kegiatan								Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Wajib Lapor LHKAN tidak melaporkan LHKAN	Risiko Kepatuhan	Kurangnya komitmen dari Wajib Lapor	Capaian pelaporan LHKAN tidak sesuai dengan target 100%	Pemda

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Program						Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3			Penilaian MRI dilakukan secara formalitas tanpa implementasi nyata.	Risiko Kepatuhan	belum terdapat metodologi dan pelaksaan monitoring evaluasi atas tindak pengendalian risiko yang telah direncanakan	Nilai MRI tidak mencerminkan kondisi sebenarnya	Pemda
Sasaran Kegiatan							Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Kegiatan								Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Program Kerja Pengawasan Tahunan belum berbasis risiko	Risiko Operasional	Kurang data dukung terkait peta risiko	Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran	Inspektorat Prov. Jateng
							Pendampingan dan Asistensi						
Sasaran Kegiatan								Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi	Evaluasi Reformasi Birokrasi belum berjalan	Risiko Operasional	Belum adanya petunjuk teknis terkait Evaluasi Reformasi Birokrasi	OPD tidak mendapat hasil penilaian Reformasi Birokrasi	Pemda
			Meningkatnya Peran Pengawas										

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			an Internal										
Sasaran Strategis				Level Kapabilitas APIP					Pemangku kepentingan tidak memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat guna perbaikan berkelanjutan	Risiko Strategis	• Audit Kinerja belum bisa menyimpulkan 3E (efektif, efisien dan ekonomis) • Belum semua pemeriksa memahami audit kinerja berbasis risiko dengan fokus 3E	Organisasi tidak mampu memenuhi tujuannya dan mencapai hasil yang diinginkan	Pemda
					PROGRAM PENYELENGGARAAN								

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					PENGAWASAN								
Sasaran Program						Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri			terdapat salah tafsir tindak lanjut terkait rekomendasi yang diberikan kepada obrik	Risiko Operasional	monitoring tindak lanjut rekomendasi dilakukan oleh Subbagian lain dan bukan pemeriksa	hasil rekomendasi tidak dapat memberikan efek perbaikan seperti apa yang diharapkan	Obyek Pemeriksaan dan Pemda
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
Sasaran Kegiatan								Jumlah Dokumen Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semesteran	Keterlambatan pembuatan dokumen IHPS	Risiko Operasional	Data dukung yang kurang memadai	Terlambatnya informasi hasil pemeriksaan	Inspektorat Prov. Jateng dan OPD

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	Risiko Operasional	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Obyek Pemeriksaan dan Pemda
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas	Terbitnya Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Risiko Operasional	Penyerahan LKPD dari Penyusun LKPD kepada Inspektorat	Keterlambatan penyerahan Reviu LKPD Provinsi Jawa Tengah	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Keuangan Daerah	(LKPD) tidak tepat waktu		Provinsi Jawa Tengah terlambat.	dan LKPD Provinsi Jawa Tengah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga performa Inspektorat dinilai tidak profesional	Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	Risiko Operasional	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubu	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Obyek Pemeriksaan dan Pemda

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											ngan dengan pihak ke 3		
							Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						
Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlambatnya proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan audit tujuan tertentu	Risiko Operasional	Ketidakpatuhan Obyek Pemeriksaan dalam diperiksa dan kesulitan dalam data dukung	Proses pemeriksaan tidak dapat sesuai target waktu	Inspektorat Prov. Jateng
Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan	Risiko Operasional	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksa	Obyek Pemeriksaan dan Pemda

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						pengawasan kinerja perangkat daerah			tidak selesai tepat waktu		waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	an terlambat	
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Terlambatnya terbitnya laporan hasil pengawasan kinerja Perangkat Daerah	Risiko Operasional	Kurangnya data atau informasi dari Obyek Pemeriksaan	Obyek Pemeriksaan belum dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan OPD

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	Risiko Operasional	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Obyek Pemeriksaan dan Pemda
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan	Penerbitan Laporan Hasil Reviu (LHR) Rancangan Akhir LPPD terlambat	Risiko Operasional	- Surat permintaan untuk reviu dari Biro Pemotdaker (LPPD)	Evaluasi LPPD tidak sesuai jadwal	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Pemerintah Daerah			terlambat di kirim ke Inspektorat Prov. Jateng - Data yang di berikan belum memadai		Provinsi Jawa Tengah

b. Analisis Risiko

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sasaran Program									
1	Pegawai memberikan	2	5	10	Ada	Rapat Koordinasi Pengendalian	Memadai	1	3	3

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pelayanan yang tidak sesuai SOP					Operasional Kegiatan				
2	Penyajian data kinerja tidak dapat dipertanggungjawabkan	2	5	10	Ada	Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan	Memadai	1	3	3
3	Tindakan pencegahan tidak terstruktur	3	5	15	Ada	Menyusun Petunjuk Teknis Pencegahan Korupsi dan evaluasi melalui Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Memadai	2	5	10
4	Penilaian MRI dilakukan secara formalitas tanpa implementasi nyata.	3	5	15	Ada	Sosialisasi Manajemen Risiko dan dilakukan evaluasi melalui Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Memadai	2	5	10

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	terdapat salah tafsir tindak lanjut terkait rekomendasi yang diberikan kepada obrik	3	5	15	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	2	5	10
6	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	2	4	8
7	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	2	4	8
8	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	2	4	8
9	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	2	4	8

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sasaran Kegiatan									
1	Selisih perhitungan gaji pegawai	1	5	5	Ada	Rapat Koordinasi Operasional Kegiatan	Memadai	1	5	5
2	Penunggakan premi asuransi barang milik daerah	1	5	5	Ada	Pencatatan dan perhitungan anggaran asuransi barang milik daerah	Memadai	1	3	3
3	Potensi tertundanya pelaksanaan Bimtek/PKS	3	5	15	Ada	Sudah ada penyusunan jadwal diklat	Memadai	2	5	10
4	Meningkatnya jumlah kunjungan studi banding dari pihak luar	3	4	12	Ada	Mengusulkan tambahan anggaran	Memadai	3	3	9

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pendistribusian barang tidak dilakukan sesuai kebutuhan	3	5	15	Ada	Pencermatan kebutuhan dan verifikas RAB Inspektorat Prov. Jateng	Memadai	2	5	10
6	Surat hilang dan tidak terlacak	2	5	10	Ada	Menghimbau kepada pelaksana agar menginput surat dalam aplikasi tatapraja	Memadai	1	4	4
7	Pembiayaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas terlambat	1	5	5	Ada	Penertiban arsip terkait pajak kendaraaan	Memadai	1	3	3
8	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	2	5	10	Ada	Rapat Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi	Memadai	1	4	4

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Wajib Lapor LHKAN tidak melaporkan LHKAN	2	5	10	Ada	Pendampingan dan monitoring Inspektorat kepada Wajib Lapor	Memadai	1	4	4
10	Program Kerja Pengawasan Tahunan belum berbasis risiko	3	5	15	Ada	Rapat Pembahasan dan Koordinasi dengan BPKP	Memadai	2	5	10
11	Evaluasi Reformasi Birokrasi belum berjalan	3	5	15	Ada	Rapat Koordinasi dengan Biro Organisasi Setda Prov. Jateng	Belum memadai	2	5	10
12	Keterlambatan pembuatan dokumen IHPS	2	5	10	Ada	Rapat Internal Subbag	Memadai	1	5	5
13	Terbitnya Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak tepat waktu	1	5	5	Ada	Rapat Koordinasi dengan BPKAD Prov. Jateng	Memadai	1	3	3

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai /Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Terlambatnya proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan audit tujuan tertentu	2	5	10	Ada	Melakukan wawancara dengan pengadu dan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur	Memadai	1	5	5
15	Terlambatnya terbitnya laporan hasil pengawasan kinerja Perangkat Daerah	2	5	10	Ada	Pengarahan sebelum penugasan dan peer review setelah pemeriksaan	Memadai	1	4	4
16	Penerbitan Laporan Hasil Reviu (LHR) Rancangan Akhir LPPD terlambat	1	5	5	Ada	Rapat Koordinasi dengan Biro Pemotdaker Setda Prov. Jateng	Memadai	1	3	3

c. Penetapan Risiko Prioritas

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemlik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5	6
	Sasaran Program				
1	Tindakan pencegahan tidak terstruktur	10	Sekretaris	Perangkat daerah belum memiliki aturan/pedoman teknis pengendalian korupsi	Skor IEPK tidak mencapai level 3
2	Penilaian MRI dilakukan secara formalitas tanpa implementasi nyata.	10	Sekretaris	belum terdapat metodologi dan pelaksaan monitoring evaluasi atas tindak pengendalian risiko yang telah direncanakan	Nilai MRI tidak mencerminkan kondisi sebenarnya
3	terdapat salah tafsir tindak lanjut terkait rekomendasi yang diberikan kepada obrik	10	Sekretaris	monitoring tindak lanjut rekomendasi dilakukan oleh Subbagian lain dan bukan pemeriksa	hasil rekomendasi tidak dapat memberikan efek perbaikan seperti apa yang diharapkan
	Sasaran Kegiatan				
1	Potensi tertundanya pelaksanaan Bimtek/PKS	10	Kasubbag AdumKeu	Penentuan Jadwal dan Peserta yang berbenturan dengan jadwal penugasan	Tidak terpenuhinya target peserta
2	Pendistribusian barang tidak dilakukan sesuai kebutuhan	10	Kasubbag AdumKeu	Perencanaan kebutuhan yang tidak tepat	Pembagian barang operasional tidak merata
3	Program Kerja Pengawasan Tahunan belum berbasis risiko	10	Irban AKD	Kurang data dukung terkait peta risiko	Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran
4	Evaluasi Reformasi Birokrasi belum berjalan	10	Irban PPD	Belum adanya petunjuk teknis terkait Evaluasi Reformasi Birokrasi	OPD tidak mendapat hasil penilaian Reformasi Birokrasi

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Implementasi RB parsial dan tidak terintegrasi	15	RB dianggap hanya urusan sekretariat/inspektorat, bukan tanggung jawab semua	Indeks Reformasi Birokrasi tidak mencerminkan kondisi riil	Menyusun rencana aksi atas implementasi RB untuk dilaksanakan oleh semua unit kerja	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030
Sasaran								
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ulasan negatif pelanggan di situs ulasan publik	10	Perilaku pegawai yang tidak sesuai NSPK ASN	Menurunnya kepercayaan masyarakat	Penerapan Whistleblowing System (WBS) internal untuk melaporkan pelanggaran perilaku	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	Indeks Manajemen Risiko	Adanya risiko strategis	10	Kurangnya komitmen UPR dalam	Berpotensi terjadi permasalaha	Melakukan FGD dan brainstromin	Inspektur Provinsi	2025 - 2030

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Risiko Perangkat Daerah		yang tidak teridentifikasi		mengidentifikasi risiko	n yang tidak ada tindak pengendalian nya	g saat penyusunan Risk Register	Jawa Tengah	
Tujuan								
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Nilai indeks SPIP menurun	15	Tim pemeriksan kurang adaptif atas perubahan regulasi atau standar penilaian SPIP dari BPKP	Perangkat daerah gagal menyesuaikan	Menyusn Juknis pelaksanaan PM SPIP tingkat Perangkat Daerah sebagai panduan Perangkat Daerah	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030
Sasaran								
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Perolehan nilai MRI tiap Perangkat Daerah dibawah 3	10	Belum efektifnya kegiatan pencegahan korupsi dan fraud di Pemerintah	Menurunnya reputasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Melakukan penyempurnaan rencana aksi pelaksanaan	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Daerah Provinsi Jawa Tengah		pengelolaan risiko		
Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	Pengawalan program prioritas Gubernur dalam peningkatan pembangunan tidak dapat dijalankan secara maksimal	10	sistem kelembagaan yang kurang mendukung, anggaran yang belum mencukupi, SDM yang masih perlu ditingkatkan, sarana penunjang yang kurang mendukung	peningkatan pembangunan yang belum dapat meningkat	Menyusun PKPT tahun n+1 dengan menyesuaikan dengan program prioritas Gubernur	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	2025 - 2030

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut, sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu penyusunan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah termasuk unsur perangkat daerahnya. Sehingga, setiap Perangkat Daerah wajib memiliki Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang di dalamnya berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Renstra berfungsi sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan – kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu strategis berdasarkan skala prioritas yang ada dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun. Renstra Bappeda merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Bappeda telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 serta Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS RI yang berfokus pada Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Penyusunan renstra juga dilakukan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat mengantisipasi perkembangan masa depan sekaligus realistis sekaligus memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Proses penyusunan dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 dilakukan melalui tahapan sebagaimana gambar 1.1.

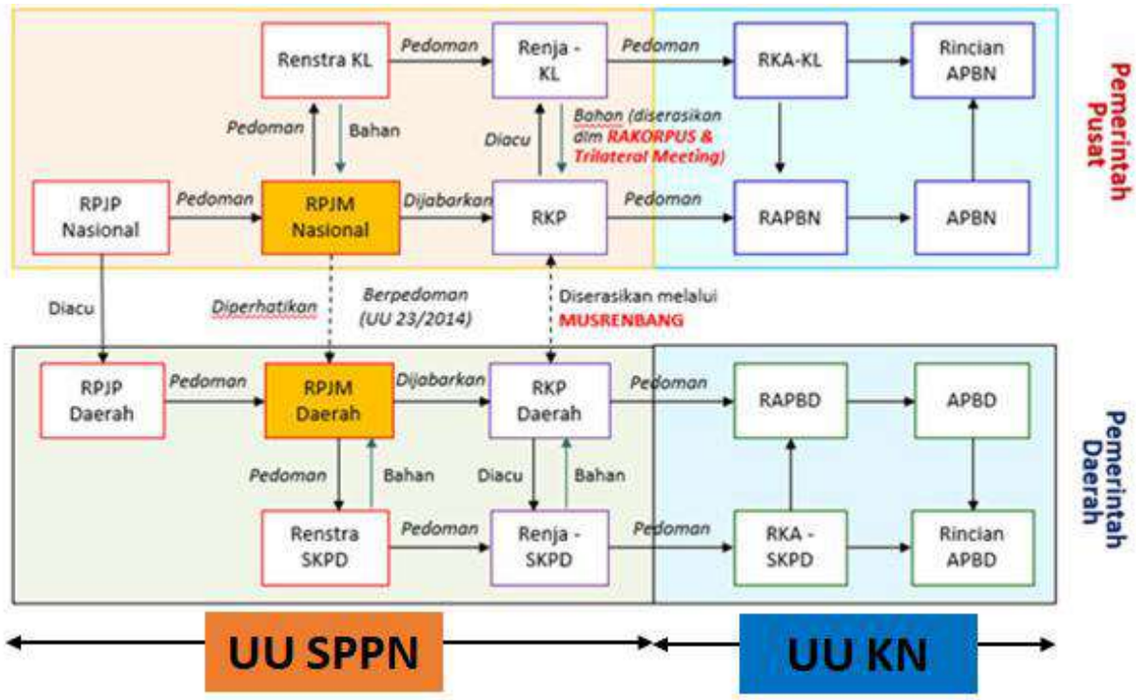

Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra
BAPPEDA 2025 - 2029

Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Penyusunan rancangan dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra PD berdasarkan masukan hasil konsultasi publik Rancangan Awal RPJMD; Pelaksanaan Forum PD/lintas perangkat daerah, Perumusan Rancangan Akhir, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Selain berpedoman pada Renstra K/L, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah juga berpedoman pada Misi Kepala Daerah terpilih khususnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas. Dengan demikian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah akan menjadi dokumen yang memuat transformasi kelembagaan yang mendukung tata Kelola pemerintah daerah yang baik dengan mewujudkan perencanaan yang berkualitas.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. Sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
b. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan
c. Sebagai indikator kunci keberhasilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan

a. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Bappeda Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya;
c. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Tengah; dan
d. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bappeda Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2025 - 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi tentang peran (tugas dan fungsi) dari perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Tengah beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun serta dilengkapi dengan Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Disamping itu juga dilengkapi dengan indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Bappeda Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, serta mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. Bidang Perekonomian dan SDA;
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. Bidang Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur bagan organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagaimana berikut:

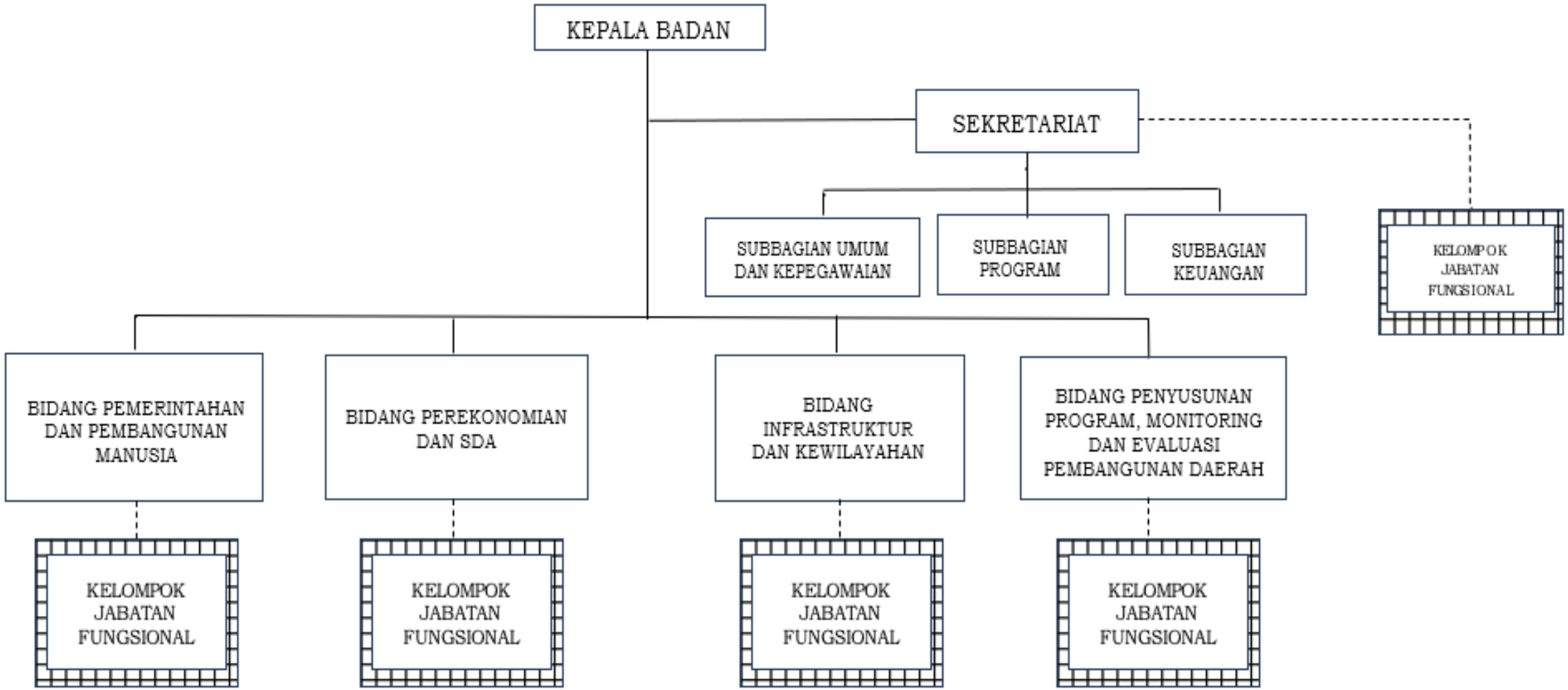

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Bappeda memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. **Sekretariat**
   a. Tugas:
      Bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

   b. Fungsi:
      1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
      2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
      3) Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
      4) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
      5) Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
      6) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
      7) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
      8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
      9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   c. Susunan Organisasi Sekretariat yaitu:
      1) Sub Bagian Program;
      2) Sub Bagian Keuangan;
      3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   d. Sub Bagian Program
      1) Tugas:

         Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

      2) Tugas tersebut meliputi:

         - Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Program;
         - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
         - Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
         - Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
         - Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;

- Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Sub Bagian Keuangan

1) Tugas:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;

2) Tugas tersebut meliputi:

- Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Keuangan;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Tugas:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian

2) Tugas tersebut meliputi:

- Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Umum dan Kepegawaian;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;

- Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. **Bidang Pemeritahan dan Pembangunan Manusia**

   a. Tugas:

      Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

   b. Fungsi:

      1) Perumusan kebijakan terkait perencanaan pembangunan dengan perangkat daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
      2) Pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan Pembangunan dengan perangkat daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
      3) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan pembangunan dengan perangkat daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
      4) Monitoring dan evaluasi terkait perencanaan pembangunan dengan perangkat daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
      5) Pelaporan dan rekomendasi terkait perencanaan pembangunan dengan perangkat daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
      6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Perekonomian dan SDA**

   a. Tugas:

      Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perekonomian dan SDA.

b. Fungsi:

1) Perumusan kebijakan terkait perencanaan pembangunan dengan perangkat daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang Perekonomian dan SDA;

2) Pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan pembangunan dengan perangkat daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang perekonomian dan SDA;

3) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan dengan perangkat daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang perekonomian dan SDA;

4) Monitoring dan evaluasi terkait perencanaan pembangunan dengan perangkat daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang perekonomian dan SDA;

5) Pelaporan dan rekomendasi terkait perencanaan pembangunan dengan perangkat daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang perekonomian dan SDA; dan

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

a. Tugas:

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

b. Fungsi:

1) Perumusan kebijakan terkait, perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
2) Pelaksanaan kebijakan terkait, perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
3) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
4) Monitoring dan evaluasi terkait, perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
5) Pelaporan dan rekomendasi terkait, perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. **Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

   a. Tugas:
      Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

   b. Fungsi:

      1) Perumusan kebijakan terkait penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, pengoordinasian perencanaan pembangunan antar bidang perencana sektoral dengan perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
      2) Pelaksanaan kebijakan terkait, penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, pengoordinasian perencanaan pembangunan antar bidang perencana sektoral dengan perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
      3) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, pengoordinasian perencanaan pembangunan antar bidang perencana sektoral dengan perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
      4) Monitoring dan evaluasi terkait, penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, pengoordinasian perencanaan pembangunan antar bidang perencana sektoral dengan perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
      5) Pelaporan dan rekomendasi terkait, penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, penkoordinasian perencanaan pembangunan antar bidang perencana sektoral dengan perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
      6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional**
   Bertugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Jumlah pegawai ASN Bappeda Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Agustus 2025 tercatat sebanyak 120 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan, dan golongan adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai

Unit Kerja	Pendidikan						
	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
Sekretariat	0	1	12	2	21	5	0
Pemeritahan dan Pembangunan Manusia	0	0	1	2	11	7	0
Perekonomian dan SDA	0	0	1	0	10	7	2
Infrastruktur dan Kewilayahan	0	0	1	0	8	9	0
Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	0	0	0	11	8	1
JUMLAH	**0**	**1**	**15**	**4**	**61**	**36**	**3**

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana S3, sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 61 orang dan S2 sebanyak 36 orang.

2. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai di Bappeda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2.:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Sekretariat	24	17
Pemeritahan dan Pembangunan Manusia	12	9
Perekonomian dan SDA	10	10
Infrastruktur dan Kewilayahan	11	7
Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11	9
JUMLAH	**68**	**52**

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Bidang Perekonomian dan SDA.

3. Pegawai Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda Provinsi Jawa Tengah terbanyak adalah pegawai Golongan III yaitu sebanyak 83 orang, sedangkan yang terendah adalah golongan I dan VII. Dilihat dari sebaran di masing – masing bidang golongan III terbanyak di Sekretariat. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Unit Kerja	Golongan						
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V	Gol VII	Gol IX
Sekretariat	1	4	29	4	1		2
Pemeritahan dan Pembangunan Manusia			18	2		1	
Perekonomian dan SDA		1	14	4			1
Infrastruktur dan Kewilayahan			11	6	1		
Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah			11	8			1
JUMLAH	**1**	**5**	**83**	**24**	**2**	**1**	**4**

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

4. Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia, komposisi pegawai di Bappeda Provinsi Jawa Tengah terbanyak adalah pegawai dengan usia lebih 30 - 40 tahun sebanyak 39 orang. Sedangkan rata rata pegawai pada usia kurang dari 30 tahun yaitu sebanyak 16 orang, usia 40 - 50 tahun sebanyak 33 orang, dan usia lebih dari 50 tahun sebanyak 32 orang. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Bidang	Usia (Tahun)			
	< 30	30 – 40	40– 50	>50
Sekretariat	5	9	7	20
Pemeritahan dan Pembangunan Manusia	5	8	5	3
Perekonomian dan SDA	4	6	6	4
Infrastruktur dan Kewilayahan	1	6	8	3
Penyusunan Program,	1	10	7	2

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
JUMLAH	**16**	**39**	**33**	**32**

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

5. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Jenis dan Jumlah Prasarana dan Sarana Bappeda

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Komputer All in One	66	Unit
2.	Monitor	24	Unit
3.	Printer	104	Unit
4.	Laptop	64	Unit
5.	LCD Proyektor	22	Unit
6.	Mesin Ketik	3	Unit
7.	AC Central	-	Unit
8.	AC Split	111	Unit
9.	AC Cassette	12	Unit
10.	Televisi	20	Unit
11.	Telepon Standar	60	Unit
12.	Telepon/Pabx	1	Unit
13.	Sound System	4	Unit
14.	Filling Cabinet	45	Unit
15.	Lan (Local Area Network)	1	Jaringan
16.	Kendaraan Roda 4	19	Unit
17.	Kendaraan Roda 2	20	Unit
18.	Ruang Sidang		
	- Lantai II	30	Orang
	- Lantai IV	30	Orang
	- Lantai VI A	200	Orang
	- Lantai VI B	50	Orang

Sumber: Data Aset Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Bappeda Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Lebih lanjut, dalam menyelenggarakan tugas pokok terkait dengan perencanaan tersebut, Bappeda menjalankan fungsi menyelenggarakan perencanaan yang menjadi kewenanangan daerah provinsi.Beberapa dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah antara lain:

Dokumen perencanaan lingkup provinsi yaitu:

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Murni dan Perubahan;
b. Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Tengah
c. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Murni dan Perubahan;
d. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
e. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan;
f. Dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah sektoral.

Dokumen perencanaan lingkup perangkat daerah:

a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Murni dan perubahan; serta
b. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Murni dan Perubahan.

Selain menjalankan fungsi perencanaan, Bappeda Provinsi Jawa Tengah juga menjalankan fungsi lain diantaranya:

a. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan:
    1) Pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah termasuk renstra dan renja perangkat daerah;
    2) Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota;
    3) Faslitasi dan Evaluasi RPJMD Kabupaten/kota.
b. Pelaksanaan tugas kesekretariatan dan tata kelola kelambagaan perangkat daerah;
c. serta pelaksanaan kegiatan dekonstrasi Bappenas dan Kemendagri.

Gambaran kinerja Bappeda berdasarkan capaian indikator kinerja utama yang merupakan indikator kinerja atas tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun sebelumnya (2020 - 2024), diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian pada Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
A	**Renstra 2018-2023**																			
I	**Tujuan**																			
1	Persentase perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas *)	%	-	-	-	90	90	-	-	-	90	90	-	-	-	100	100	-	-	-
2	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	-	73	76	84	85	-	83,25	80,75	81,75	86,25	-	114	106,25	97,32	101,47	-
3	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	%	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	90	90	-	-	-	100	100	-
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (BRIDA)	Nilai	-	-	-	-	-	84	85	-	-	-	81,75	86,25	-	-	-	97,32	101,47	-
5	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	67	71	-	-	-	71,32	71,32	-	-	-	106,44	100,45	-
6	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	4	4,2	-	-	-	4,12	4,23	-	-	-	103	100,71	-
II	**Sasaran**																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian pada Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
1	Persentase Konsistensi , keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	-	90	90	90	90	-	90	90	90	90	-	100	100	100	100	-
2	Persentase hasil kelitbangan iptekin yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	-	90	90	-	-	-	90	90	-	-	-	100	100	-	-	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	-	73	76	84	85	-	83,25	80.75	81,75	86,25	-	114	106,25	97,32	101,47	-
4	Nilai SAKIP PD	Angka	-	-	-	81	82	81,50	82	-	80,23	80,33	81,02	84,3	-	99	97,96	99,41	102,80	-
5	Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor	%	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	90	90	-	-	-	100	100	-
6	Persentase inovasi daerah yang diterapkan	%	-	-	-	-	-	90	100	-	-	-	90	100	-	-	-	100	100	-
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (BRIDA)	Nilai	-	-	-	-	-	84	85	-	-	-	81,75	85	-	-	-	97,32	100	-
8	Nilai SAKIP OPD (BRIDA)	Angka	-	-	-	-	-	81,50	82	-	-	-	81,02	84,3	-	-	-	99,41	102,80	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian pada Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
9	Persentase urusan pemerintah daerah yang mengimplementasikan hasil riset	%	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	-	-	-	100	100	-
III	**Program**																			
1	Persentase implementasi riset dan pengembangan	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
2	Persentase inovasi dan teknologi yang diterapkan	%	-	-	-	75	75	-	-	-	75	75	-	-	-	100	100	-	-	-
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industry	%	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	-	-	-	100	100	-
4	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Ekonomi dan Industri	%	-	-	-	-	-	84	100	-	-	-	84	100	-	-	-	100	100	-
5	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	-	-	-	-	-	84	100	-	-	-	84	100	-	-	-	100	100	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian pada Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
6	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	%	-	-	-	-	-	84	100	-	-	-	84	100	-	-	-	100	100	-
7	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	-	-	-	100	100	-
8	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	-	-	-	100	100	-
9	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
10	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (BRIDA)	%	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian pada Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
11	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA	%	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
12	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
13	Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor	%	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	90	90	-	-	-	100	100	-
14	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang – undangan	%	-	-	-	90	90	90	90	-	90	90	90	90	-	100	100	100	100	-
15	Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya**)	%	-	-	-	90	90	90	90	-	90	90	90	90	-	100	100	100	100	-
16	Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian**)	%	-	-	-	90	90	90	90	-	90	90	90	90	-	100	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian pada Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
17	Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup**)	%	-	-	-	90	90	90	90	-	90	90	90	90	-	100	100	100	100	-
B	**Renstra 2024-2026**																			
I	**Tujuan**																			
1	Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
2	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	-	-	-	-	-	-	-	72,5	-	-	-	-	82,41	-	-	-	-	113,67
II	**Sasaran**																			
1	Persentase Keterpenuhan Substansi dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sesuai Regulasi	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
2	Prosentase Keselarasan Program Dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian pada Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	94	-	-	-	-	111,90
4	Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	-	-	-	-	-	-	2,91	-	-	-	-	3,05	-	-	-	-	104,81
III	**Program**																			
1	Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
2	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
3	Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
4	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
5	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian pada Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
6	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

Keterangan:

*) Terjadi penyesuaian indikator di tahun 2022, dari 1 indikator yaitu Persentase perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas menjadi 3 indikator yaitu Persentase perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Indeks Inovasi Daerah, dan Indeks Daya Saing Daerah;

**) Terjadi penyesuaian nomenklatur mulai tahun 2022.

Berdasarkan tabel 2.6, selama tahun 2020-2024, indikator kinerja Bappeda secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan. Bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melampaui target yang telah ditentukan. Pada tahun 2022 terjadi penyesuaian indikator, dari 1 indikator yaitu Persentase perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas menjadi 3 indikator yaitu Persentase perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Indeks Inovasi Daerah, dan Indeks Daya Saing Daerah. Selanjutnya meskipun terjadi perubahan struktur organisasi Bappeda, dimana fungsi kelitbangan berdiri menjadi perangkat daerah baru (Badan Riset dan Inovasi Daerah/Brida) namun untuk target dan capaian program masih berada di Bappeda hingga akhir tahun 2023.

Faktor-faktor yang mendukung ketercapaian kinerja di Bappeda Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020 – 2024 adalah:

1. Dukungan seluruh pegawai serta keterlibatan aktif pimpinan dalam pencapaian target yang ditetapkan;
2. Pendidikan dan Pelatihan pegawai;
3. Peningkatan kualitas sarana dan Prasarana;
4. Pemahaman budaya kerja;
5. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan;
6. Kerjasama dengan pihak luar (pakar dan akademisi) dalam upaya *transfer knowledge*.

Beberapa hal eksternal yang mempengaruhi kinerja Bappeda dalam kurun waktu tersebut yaitu:

1. Pandemi Covid

   Dampak dari pandemi Covid tahun 2020 mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Provinsi Jawa Tengah bahkan Nasional dan Dunia. Hal tersebut juga mempengaruhi kinerja Bappeda Provinsi Jawa Tengah selaku Perangkat Daerah dengan tupoksi penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah karena prioritas pembangunan lebih difokuskan untuk penanganan pada masa pandemi dan pemilihan ekonomi pasca pendemi. Ditengah Kebijakan refocusing yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 dan 2021, perangkat daerah diminta untuk tetap mengoptimalkan capaian kinerja dengan mengefektifkan anggaran yang ada serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempengaruhi Perubahan struktur belanja dari BL dan BTL menjadi Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer;
3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mempengaruhi Nomenklatur Program dan Indikator Kinerja, Nomenklatur Kegiatan dan Sub kegiatan, meskipun begitu perubahan nomenklatur tersebut tidak mempengaruhi indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra. Terakhir

dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berdampak pada fungsi kelitbangan telah beralih pengelolaannya menjadi perangkat daerah tersendiri yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Inmendagri 52 tahun 2022

   Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Instruksi ini dikeluarkan untuk mengatur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, yaitu RPD 2024-2026, agar pembangunan dan pemerintahan daerah tetap berjalan stabil meskipun ada kekosongan kepemimpinan akibat berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Adapun Perbandingan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Provinsi jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	25.200	26.460	26.460	30.240	30.240	25.200	26.460	26.460	30.240	30.240	25.200	26.460	26.460	30.240	30.258	100	100	100	100	100,06	20,00	20,07
2	Belanja	29.610.959	31.091.507	32.646.083	34.278.387	50.545.967	46.063.614	39.177.194	53.122.115	66.958.059	48.159.164	44.487.807	38.223.036	50.844.006	64.940.226	46.541.850	97,41	97,56	95,71	96,99	96,64	4,55	4,62
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada sisi pendapatan, selama tahun 2020 sampai dengan 2024 selalu terpenuhi antara target dengan capaian. Adapun hal – hal yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya target pendapatan adalah:

1. Pengendalian kegiatan secara rutin perbulan, per tri wulan, per semester dan per tahun;
2. Ketepatan dalam menentukan target disesuaikan potensi yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Pada sisi belanja, selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 rasio realisasi anggaran selalu di atas 95 % atau cukup baik. Hal – hal yang mempengaruhi realisasi kinerja keuangan adalah:

1. Pengendalian rutin yang dilaksanakan setiap bulan dengan melibatkan unsur pimpinan;
2. Efektifitas pembahasan solusi atas permasalahan dan kendala yang dihadapi setiap bulan.

Adapun rata - rata pertumbuhan anggaran pendapatan sebesar 20% dan realisasi pendapatan sebesar 20,07%. Sedangkan rata - rata pertumbuhan anggaran belanja sebesar 4,55% dan realisasi belanja sebesar 20,07%. Pada Tahun 2021 pagu anggaran Bappeda turun karena adanya efisiensi penanganan Pandemi Covid. Selanjutnya kembali naik di Tahun 2022 dan Tahun 2023 pada saat Bappeda masih digabung dengan UPT BRIDA. Pada Tahun 2024, Brida Provinsi Jawa Tengah yang telah terbentuk pada pertengahan tahun 2023, telah dapat mengelola anggarannya sendiri.

2.4 Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Bappeda Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8

Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perencanaan pembangunan daerah belum berkualitas	Keselarasan antar dokumen perencanaan masih kurang	▪ Kapabilitas SDM belum memadai ▪ Masih belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen perencanaan Provinsi dan Kabupaten/kota
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya berbasis data, hasil evaluasi, dan risiko.	▪ Masih belum optimalnya sinkronisasi dan konsistensi antar kebijakan ▪ Masih kurangnya komitmen penyediaan data pembangunan ▪ Penyusunan mitigasi risiko masih bersifat administratif ▪ Evaluasi masih bersifat administratif ▪ Forum Koordinasi (perencana, peneliti dan analis kebijakan) belum optimal
		Kesesuaian penjenjangan dan capaian kinerja PD dengan Daerah masih kurang	Belum optimalnya asistensi penyusunan dokumen perencanan perangkat daerah

2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi isu strategis memperhatikan permasalahan, potensi, peluang serta lingkungan strategis (global, nasional, regional), termasuk implikasi kebijakan nasional, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta hasil penjaringan dari *stakeholder*.

Dalam melaksanakan fungsi penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Jawa Tengah memiliki tantangan dan peluang dalam pengembangan Pelayanan. Guna memperoleh analisa terkait dengan tantangan dan peluang dimaksud, maka diurai melalui tabel analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 2.9
Analisis SWOT

Internal / **Eksternal**	**S (*Strengths*)**	**W (*Weakness*)**
	1. Peran kunci dalam memastikan keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan pembangunan; 2. Memiliki kedudukan strategis sebagai kordinator perencanaan seluruh perangkat daerah; 3. Keterlibatan Bappeda dalam setiap penyusunan kebijakan sektoral; 4. Memiliki peran strategis sebagai pengendali pembangunan daerah seiring dengan adanya fungsi monitoring dan evaluasi; 5. Memiliki kedudukan sebagai koordinator forum satu data; 6. Memiliki kedudukan sebagai koordinator unit manajemen risiko pemerintah daerah; 7. Memiliki jaringan koordinasi luas baik dengan *stakeholder* dalam negeri maupun luar negeri; 8. Manajemen perubahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis reformasi birokrasi; 9. Ketersediaan sumber daya berupa sarana prasarana, anggaran yang cukup memadai dalam pelaksanaan program kegiatan.	1. Masih terdapat gap kompetensi SDM Perencana; 2. Keterbatasan kapasitas teknologi informasi dan pengelolaan big data; 3. Koordinasi lintas OPD kadang belum optimal (ego sektoral); 4. Ketergantungan pada data sektoral yang tidak selalu update atau valid; 5. Kapasitas fiskal daerah terbatas untuk mendukung inovasi perencanaan; 6. Belum optimalnya implementasi perencanaan berbasis risiko; 7. Hasil evaluasi belum seluruhnya dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan.

O (*Opportunities*)	SO (*Strengths* - *Opportunities*)	WO (*Weakness* - *Opportunities*)
1. Dukungan kebijakan nasional (SDGs, RPJPN, RPJMN, Prioritas Presiden yang dapat dijadikan acuan dan peluang sinergitas; 2. Tren Global seperti digitalisai, green economy, smart city, dan ekonomi Syariah; 3. Teknologi Big Data, AI, GIS dapat digunakan sebagai perencanaan berbasis bukti; 4. Peluang Kerjasama dengan Non Pemerintah baik skala regional, nasional maupun global.	1. Menggunakan kewenangan koordinasi perencanaan untuk mengintegrasikan tren tema pembangunan seperti: pangan, green economy, digitalisasi, dan pariwisata syariah ke dalam dokumen perencanaan daerah; 2. Mengoptimalkan SDM perencana dan akses data sektoral untuk mendukung perencanaan berbasis bukti dengan memanfaatkan big data**,** GIS, dan AI; 3. Memanfaatkan legitimasi regulasi formal (RPJPD/RPJMD) untuk menjalin kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga donor.	1. Mengatasi gap kompetensi SDM dengan memanfaatkan peluang kerjasama pelatihan dari perguruan tinggi, LSM, dan pusat pelatihan nasional; 2. Mengembangkan kompetensi SDM Perencanaan dalam hal manajemen risiko pembangunan; 3. Mengembangkan sistem informasi perencanaan terintegrasi dengan memanfaatkan hasil evaluasi Pembangunan; 4. Mengatasi keterbatasan fiskal daerah dengan mendorong skema pendanaan alternatif (KPBU, Obligasi, CSR).
T (*Threats*)	**ST (*Strengths* - *Threats*)**	**WT (*Weakness* -*Threats*)**
1. Ketidakpastian ekonomi global (krisis, inflasi, geopolitik); 2. Perubahan regulasi pusat yang sangat dinamis dan menuntut penyesuaian cepat; 3. Ketergantungan 25ector pada pusat yang membuat daerah rentan jika ada pengurangan transfer dana; 4. Ancaman perubahan iklim dan bencana alam yang mempengaruhi Pembangunan; 5. Disrupsi teknologi yang lebih cepat daripada kesiapan daerah; 6. Pola politik lokal yang dapat mengganggu konsistensi pembangunan jangka panjang-menengah; 7. Ego sektoral OPD.	1. Mengoptimalkan peran koordinatif Bappeda untuk menjaga konsistensi pembangunan lintas sektor, meskipun ada perubahan regulasi nasional atau dinamika politik local; 2. Menggunakan legitimasi regulasi perencanaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan jangka panjang menghadapi pergantian kepemimpinan daerah; 3. Menggunakan data sektoral yang kuat untuk melakukan mitigasi risiko terkait perubahan iklim, inflasi, dan ancaman krisis global; 4. Mensinergikan peran multipihak dalam hal pembiayaan pembangunan daerah (pelibatan non pemerintah: Swasta, CSR, Perguruan Tinggi).	1. Memperkuat kualitas dan validitas data perencanaan untuk menghindari resiko salah arah akibat perubahan regulasi pusat yang cepat; 2. Mengurangi ego sektoral dengan membangun mekanisme forum lintas OPD agar pembangunan tetap terkoordinasi; 3. Mengantisipasi keterbatasan SDM perencana dengan membangun pool tenaga ahli eksternal (konsultan, akademisi) untuk mendukung tugas perencanaan strategis.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Bappeda Provinsi Jawa Tengah perlu memanfaatkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi hambatan dan ancaman.

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, telaah Renstra Kementerian/Lembaga, serta telaah KLHS dan RTRW, dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. **Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan nasional**

   Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) memiliki kewenangan untuk melakukan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan evaluasi Raperda kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Upaya fasilitasi dan evaluasi dilakukan untuk mengharmonisasi kebijakan dan prioritas nasional termasuk target-target indikator makro pembangunan dengan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dengan tetap memeperhatikan *local wisdom*.

   Sinkronisasi dan harmonisasi sebagai upaya untuk memperoleh keselarasan pembangunan nasional dan daerah dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

2. **Kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis bukti**

   Salah satu tolok ukur dari perencanaan pembangunan yang berkualitas ditunjukkan melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan. Dokumen perencanaan pembanguan daerah menjadi pijakan awal terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dinyatakan berkualitas jika dari mulai perumusan permasalahan dan isu strategis berbasis bukti (data dan informasi serta hasil evaluasi) serta mempertimbangkan risiko. Evaluasi sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan karena dapat digunakan untuk pemantauan kemajuan, identifikasi masalah secara tepat, dan menemukan stratgei yang paling tepat serta efektif. Dalam penyusunan perencanaan perlu mempertimbangkan risiko baik internal maupun eksternal, agar dalam pencapaian tujuan sasaran tidak mengalami hambatan.

   Selain berbasis bukti, dokumen perencanaan pembangunan harus konsisten. Konsisten yang dimaksud adalah konsistensi muatan substansif antara permasalahan dan isu dengan penetapan tujuan sasaran serta penyusunan strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan melalui program/kegiatan pembangunan. Perumusan permasalahan dan isu strategis harus berbasis bukti, yang dapat diperoleh dari hasil riset, kajian, evaluasi dan *brainstorming*. Strategi dan arah kebijakan disusun guna menyelesaikan permasalahan pembangunan dan menjawab isu strategis serta memperhatikan kebijakan nasional.

3. Keterhubungan kinerja PD mendukung kinerja daerah

Keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di Pemerintah Provinsi telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dapat secara langsung berhubungan dengan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk pencapaian institusinya saja.

4. Kompetensi SDM Perencana

SDM Perencana berperan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan; mendampingi Perangkat Daerah (PD) melakukan penjenjangan kinerja, merumuskan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan yang selaras daerah dan nasional; memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD); serta mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hingga mengevaluasi kinerja hasil dan dampak.

Mengingat pentingnya peran SDM Perencana dalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya kompetensi yang memadai. Peningkatan komptensi SDM Perencana dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar. Berbagai ruang dan kesempatan dibuka bagi SDM Perencana untuk meningkatkan kompetensi diri, antara lain pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan Pusbindiklatren Bappenas bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi terkemukda di Indonesia.

5. Koordinasi dan Kerjasama Lintas

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas harus mampu menangkap isu-isu global, nasional dan regional namun juga memiliki upaya antisipatif serta sudut pandang dari berbagai aspek. Hal ini selaras dengan tuntutan global yaitu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwasannya pembangunan bukan hanya berorientasi ekonomi atau SDM saja, namun juga memperhatikan keberlangsungan ekosistem dan lingkungan.

Untuk itu perlu adanya elaborasi antara SDM Perencana, SDM Peneliti dan SDM Analis Kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Ketiga SDM fungsional tertentu tersebut mempunyai peran dan kontribusi terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kemampuan *strategic planning* dimiliki oleh SDM Perencana; kemampuan analisis kebijakan hingga menghasilkan dampak dimiliki oleh SDM Analis Kebijakan; dan kemampuan mengobservasi, hingga memecahkan masalah dimiliki oleh SDM Peneliti. Ketiga SDM ini berkolaborasi untuk menyusun perencanaan berbasis bukti (*evidence-based*).

Secara tugas dan fungsi dan kewenangan Bappeda lebih mendukung kepada penciptaan tata kelola yang baik, namun demikian terkait isu-isu dan sasaran pembangunan yang lain tetap menjadi tugas Bappeda bersama Perangkat Daerah terkait untuk mengawal ketercapaian dan keberhasilannya, seperti penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan perekonomian, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah.

Tabel 2.10

Perumusan Isu Strategis Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). 2. Bappeda merupakan bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 3. Keterlibatan Bappeda pada program prioritas nasional yang didelegasikan ke daerah. 4. Bappeda sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, dan Sekretariat Forum CSR. 5. ASN yang merupakan Jabatan Fungsional tertentu yaitu:	Perencanaan pembangunan daerah belum berkualitas.	1. Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal. 2. Sinergi dan kerjasama antar daerah dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah yang belum optimal.	1. Hukum dan Tata Kelola. 2. Kemitraan global.	1. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 2. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas.	-	1. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan nasional. 2. Kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis bukti. 3. Kapasitas SDM Perencana. 4. Keselarasan kinerja PD mendukung kinerja daerah. 5. Koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Perencana, Peneliti, Analis Kebijakan. 6. Peluang pengembangan kompetensi JFP bekerjasama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. 7. Sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (*e planning-e budgeting-e controlling-e rembugan*). 8. Forum-forum Koordinasi antar OPD lingkup provinsi, antar provinsi dengan kabupaten/Kota serta antar eksekutif dan legislatif.						

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governnance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang perencanaan pembangunan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui koordinasi, sinkronisasi dan asistensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data, evaluasi dan risiko. Bappeda Provinsi Jawa Tengah Mendukung pada sasaran ke-1 dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu mencerminkan lingkungan yang kolaboratif dan sinergis antar pihak yang terkait di dalamnya.

Tujuan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029 adalah ”Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan” yang akan dicapai melalui 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. **Sasaran 1**: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2. **Sasaran 2**: Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan;
3. **Sasaran 3**: Terwujudnya Sumber Daya Manusia berdaya saing dan berkarakter.

Kontribusi Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam RENSTRA BAPPEDA Tahun 2025-2029 adalah pada Sasaran Pertama ”Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah”.

a. Tujuan Bappeda

Mendasarkan uraian dan perumusan permasalahan dan isu strategis serta dukungan pencapaian terhadap Sasaran 1 daerah, maka dirumuskan Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda selama Tahun 2025 – 2029 adalah:

1) **Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**
   Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas artinya perencaanaan pembangunan daerah yang memiliki keselarasan antara nasional dan daerah, kesesuaian perencanaan daerah yang berbasis data dan informasi, permasalahan dan isu strategis, hasil evaluasi, dan risiko serta keterhubungan perencanaan sektoral agar mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja tujuan ini adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dimaksud adalah Indikator Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi Jawa Tengah atau Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.
2) **Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
   Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki makna bahwa penyelenggaraan organisasi perangkat daerah Bappeda Provinsi Jawa Tengah mengacu pada 8 area reformasi Birokrasi serta memperhatikan kualitas pelayanan perangkat daerah dan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah. Indikator kinerja tujuan ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Sasaran Bappeda

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2025-2029, dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, memiliki 3 sasaran yaitu:
   1.1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah
   Indikator kinerja sasaran ini adalah aspek sinergi dalam IPPN yang ditujukan untuk mengukur kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional.
   1.2. Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah
   Indikator kinerja sasaran ini adalah aspek kualitas perencanaan dalam IPPN yang mengukur kesesuaian perencanaan dari tiap tiap bagiannya (Kesesuaian antara isu strategis – Target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD).
   1.3. Meningkatnya keterhubungan perencanaan pembangunan daerah
   Indikator kinerja sasaran ini adalah aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja yang mengukur tingkat keterhubungan penyusunan kinerja di

Pemerintah Provinsi telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional.

2. Tujuan Meningkatkan Kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, memiliki 2 sasaran yaitu:
   2.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   Indikator kinerja sasaran ini adalah indeks manajemen risiko perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengukur tingkat implementasi manajemen risiko di lingkup perangkat daerah.
   2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   Indikator kinerja sasaran ini adalah indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah yang diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	angka	91,51	93,89	93,91	94,19	94,44	94,64	94,84	95,20	95,20
		Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Skor Aspek Sinergi dalam IPPN	angka	27,01	27,53	27,55	27,75	28	28,2	28,4	28,6	28,60
		Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah	Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN	angka	57,11	56,36	56,36	56,44	56,44	56,44	56,44	56,60	56,60
		Meningkatnya keterhubungan perencanaan pembangunan daerah	Skor Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	angka	7,39	10	10	10	10	10	10	10	10

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	72,4	82,41	72,50	82,50	82,75	83	83,25	84	84
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	3,075	3,05	2,92	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	3,30
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	90	94	84,25	94,25	94,50	95	95,10	95,20	95,20

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappeda guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat terlihat dari Analisa SWOT yang telah dijabarkan sebelumnya pada bab II.

Selanjutnya dari hasil Analisa SWOT tersebut, dapat ditentukan strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan di Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1. Mengintegrasikan tema dan prioritas pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah; 2. Menggunakan legitimasi regulasi perencanaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan jangka menengah menghadapi dinamika politik local; 3. Mengoptimalkan peran koordinatif Bappeda untuk menjaga konsistensi pembangunan lintas sektor, meskipun ada perubahan regulasi/kebijakan nasional atau dinamika politik lokal; 4. Memanfaatkan legitimasi regulasi formal (RPJPD/RPJMD) untuk menjalin kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga donor, termasuk dalam hal pembiayaan pembangunan daerah.	1. Sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan program nasional; 2. Menyusun rencana pembangunan daerah tahunan (RKPD) berbasis tema atau prioritas pembangunan; 3. Mengawal penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja) agar mengintegrasikan tema atau prioritas pembangunan; 4. Mengoptimalkan forum-forum komunikasi legislative-eksekutif (dialig interaktif, sidang komisi), sebagai media sosialisasi perencanaan pembangunan jangka menengah dan penjabarannya secara tahunan; 5. Memanfaatkan forum fasilitasi dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota untuk menjaga keselarasan pembangunan daerah; 6. Memanfaatkan forum Perangkat Daerah dan forum sejenis untuk

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			mengawal konsistensi perencanaan sectoral di daerah dengan nasional; 7. Membangun mekanisme komunikasi antara pemerintah dengan non pemerintah antara lain akademisi, media, komunitas masyarakat (termasuk kelompok rentan) serta dunia usaha.
	Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah	1. Memanfaatkan peluang kerjasama pelatihan dari perguruan tinggi, LSM, dan pusat pelatihan nasional, termasuk dalam pengembangan kompetensi manajemen risiko pembangunan; 2. Mengoptimalkan sistem informasi perencanaan terintegrasi dengan memanfaatkan hasil evaluasi pembangunan; 3. Menggunakan data sektoral berkualitas, valid dan terintegrasi untuk melakukan mitigasi risiko terkait dinamika global dan nasional.	1. Sinkronisasi dan konsistensi antar kebijakan dan peningkatan partisipasi pemangku kepentingan; 2. Penguatan Penyediaan Data dan Peningkatan kualitas data Pembangunan; 3. Penguatan Manajemen risiko; 4. Peningkatan Komitmen agar perencanaan memperhatikan hasil evaluasi; 5. Mendukung terselenggaranya forum koordinasi perencana, peneliti dan analis kebijakan; 6. Memperkuat kompetensi SDM perencana daerah melalui pelatihan, sertifikasi dan kemitraan akademik; 7. Memanfaatkan sistem informasi perencanaan terintegrasi berbasis data dan evaluasi; 8. Mengoptimalkan peran Bappeda sebagai koordinator forum satu data.
	Meningkatnya keterhubungan perencanaan pembangunan daerah	1. Peningkatan kesesuaian penjenjangan dan capaian kinerja PD dengan Daerah; 2. Meningkatkan keterpaduan dalam perencanan pembangunan sektoral	1. Meningkatkan penyelarasan antara tujuan pembangunan daerah dengan target dan indikator kinerja yang terukur; 2. Mengintegrasikan perencanaan lintas OPD melalui forum kolaborasi perencanaan daerah;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Mendukung terselenggaranya forum koordinasi perencana, peneliti dan analis kebijakan.

Dari uraian kinerja dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang diukur melalui indikator kinerja tujuan dan sasaran menunjukan bahwa terdapat tiga aspek utama yang merupakan peran dan fungsi Bappeda yaitu mengawal dan memastikan terhadap ketercapaian aspek keselarasan perencanaan pembangunan daerah, aspek kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dan aspek keterhubungan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan kinerja perangkat daerah.

Mendasarkan ketiga aspek tersebut, maka dirumuskan pentahapan RENSTRA Bappeda yang diselaraskan dengan pentahapan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel 3.3.:

Tabel 3.3

Pentahapan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Peletakan pondasi kebijakan yang selaras dan konsolidasi prioritas daerah serta pemantapan penjenjangan kinerja untuk pencapaian sasaran daerah	Peningkatan kinerja dan percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah serta koordinasi lintas sektor dan pemerintahan	Akselerasi kinerja pembangunan daerah berorientasi dampak, kolaboratif dan adaptif	Pemantapan kinerja pembangunan daerah konsisten dengan target sasaran dan prioritas serta berbasis pengendalian dan evaluasi secara integratif	Perwujudan capaian pembangunan daerah berbasis keselarasan, konsistensi perencanaan dengan hasil dan keterhubungan

Pada tahap pertama ini, peletakan pondasi kebijakan dilaksanakan guna memastikan bahwa arah pembangunan daerah selaras dengan arah pembangunan nasional. Dan diperlukan konsolidasi program prioritas daerah dengan nasional dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untk menjamin kesesuiaan perencanaan pembangunan, serta penjenjangan kinerja daerah dan perangkat daerah untuk menjaga keterhubungan kinerja.

Tahap kedua merupakan tahap peningkatan kinerja pembangunan yang lebih ditekankan pada upaya pengawalan program-program prioritas daerah dalam mendukung nasional. Selain itu, Bappeda mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor maupun lintas pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Tahap ketiga adalah tahap akselerasi kinerja yaitu program-program prioritas atau unggulan agar dipercepat upaya pencapaiannya dan mulai menunjukkan keberhasilan yang dilihat dari kebermanfaatan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan keselarasannya dengan program prioritas nasional maupun agenda global. Pada tahap ini perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu mengakomodir akselerasi program sesuai dinamika kebijakan. Selain itu kinerja perangkat daerah dipacu dalam bentuk proyek kolaborasi lintas sektor serta *creative financing*.

Pada tahap keempat, pemantapan kinerja dilaksanakan melalui pengawalan terhadap capaian pembangunan daerah, memastikan bahwa pelaksanaan program prioritas selaras dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta pengendalian dan evaluasi lintas sektor secara holistic dan integrative.

Tahap kelima merupakan tahap terakhir pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan sasaran serta capaian pembangunan daerah terwujud, melalui keselarasan pembangunan daerah dengan nasional, kesesuaian antara perencanaan dengan hasil pembangunan serta keterhubungan seluruh sektor pembangunan terhadap kinerja daerah.

Dari kinerja dan sasaran utama yang dirumuskan, maka Bappeda bukan hanya bertugas untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, namun juga memastikan bahwa ketiga aspek ini telah dilaksanakan dengan baik, yaitu:

1. Menjaga arah atau keselarasan pembangunan daerah dengan nasional;
2. Menjamin kesesuaian atau substansi muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah konsisten;
3. Menjamin keterhubungan antara kinerja perangkat daerah secara kolaboratif dengan kinerja daerah.

Selain pentahapan di atas, RENSTRA BAPPEDA Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan fokus dan tema pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dengan dukungan sebagai berikut:

a. **Tema Tahun 2026** “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”

   Sebagai tahap awal pembangunan, prioritas pangan tidak hanya dimaknai sebagai ketahanan produksi dan distribusi, tetapi juga sebagai fondasi keselarasan pembangunan. Bappeda memiliki peran untuk memastikan kebijakan pangan daerah selaras dengan program prioritas nasional seperti kedaulatan pangan dan pengendalian inflasi. Pada aspek kesesuaian, Bappeda bertugas memastikan strategi pangan tercermin dalam dokumen perencanaan RPJMD, RKPD dan RENSTRA, Renja Perangkat Daerah, sehingga antar dokumen konsisten dan dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah terkait. Dari sisi keterhubungan, Bappeda mendorong agar indikator kinerja Perangkat Daerah lingkup

pertanian dan pangan saling terkait dalam mewujudkan ekosistem pangan yang kuat dan berdaya saing.

b. **Tema Tahun 2027** "Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi"
Pada tema ini pembangunan diarahkan pada diversifikasi ekonomi melalui sektor pariwisata berbasis syariah. Keselarasan diwujudkan melalui integrasi dengan kebijakan nasional pengembangan wisata halal dan ekonomi syariah. Bappeda memastikan kesesuaian arah pembangunan ini tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMD, RKPD dan RENSTRA, Renja Perangkat Daerah secara lintas sektor, dimulai dari sektor pariwisata, UMKM hingga perhubungan, agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan. Keterhubungan kinerja ditata dengan mengaitkan target perangkat daerah dengan instansi atau lembaga pemerintah/non pemerintah lainnya sehingga tercipta ekosistem pariwisata syariah yang utuh, mulai dari atraksi, produk, hingga SDM.

c. **Tema Tahun 2028** "Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau"
Fokus tema ketiga adalah mengoptimalkan potensi desa sebagai basis pembangunan ekonomi sekaligus mendorong tumbuhnya industri ramah lingkungan. Keselarasan pada tahap ini diwujudkan melalui sinkronisasi kebijakan pengembangan desa dengan program pembangunan desa berkelanjutan dan green economy. Pada aspek kesesuaian, Bappeda memastikan strategi penguatan desa dan industri hijau ke dalam dokumen perencanaan RPJMD, RKPD dan RENSTRA, Renja Perangkat Daerah secara konsisten dan kolaboratif diimplementasikan dalam program kegiatan Perangkat Daerah terkait, sehingga program pembangunan desa, energi bersih, dan pengelolaan lingkungan dapat berjalan optimal. Dari sisi keterhubungan, Bappeda berperan mengintegrasikan target kinerja perangkat daerah lingkup pemberdayaan masyarakat desa, perindustrian, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral, agar pembangunan desa tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan.

d. **Tema Tahun 2029** "Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan"
Bappeda memfokuskan arah pembangunan pada penguatan daya saing daerah di tingkat nasional dan global. Keselarasan diwujudkan dengan mengaitkan target daerah dengan agenda transformasi ekonomi nasional, penguatan investasi, serta digitalisasi layanan publik. Pada aspek kesesuaian, Bappeda memastikan strategi daya saing dituangkan dalam dokumen perencanaan, sehingga seluruh perangkat daerah memiliki pedoman yang sama dalam berinovasi dan meningkatkan pelayanan. Sementara dari aspek keterhubungan, Bappeda menjadi penghubung utama antara kinerja perangkat daerah yang beragam agar saling melengkapi dan bersama-sama meningkatkan posisi daya saing daerah.

e. **Tema Tahun 2030** "Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan"

Mendasarkan peran dan fungsi Bappeda yang berlandaskan pada aspek keselarasan, kesesuaian dan keterhubungan, maka tahun terakhir pelaksanaan RPJMD atau RENSTRA Bappeda diharapkan mampu mewujudkan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan. Kondisi ini dapat diukur melalui keberhasilan ketercapaian target dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2030. Implementasi terhadap tiga aspek tersebut dilakukan melalui upaya fasilitasi, koordinasi serta asistensi dalam perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan.

3.3. Manajemen Risiko Strategis

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Skor Aspek Sinergi dalam IPPN	Terjadinya disharmoni antara perencanaan daerah dan prioritas pembangunan nasional	12	1. Dinamika kebijakan pusat yang berubah-ubah 2. Kebijakan KDH yang fokus pada kepentingan di daerah 3. Komunikasi antara pemerintah pusat ke Provinsi serta Provinsi ke Kab/kota kurang optimal 4. Kepentingan atau ego sektoral di pemerintah pusat 5. Siklus perencanaan yang tidak sinkron	Tidak tercapainya sasaran pembangunan daerah	Melaksanakan Koordinasi intensif dengan Pusat dan Kabupaten Kota baik dalam bentuk rapat koordinasi maupun forum perencanaan tambahan.	Kepala Bappeda	2025-2029

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
				antara pusat dan daerah				
Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah	Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN	Perencanaan pembangunan daerah tidak memperhatikan substansi antar bagian	12	1. Kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan dokumen 2. Kurangnya data yang cukup memadai 3. Hasil evaluasi belum digunakan sebagai bahan perencanaan	Perencanaan Pembangunan tidak berkualitas	1. Memperkuat kompetensi SDM perencana daerah melalui pelatihan, sertifikasi ataupun kemitraan akademik 2. Penguatan Penyediaan Data dan Peningkatan kualitas data Pembangunan 3. Menganalisis hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya 4. Memeperhatikkan dan menindaklanjuti hasil review APIP	Kepala Bappeda	2025-2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Strategi adalah rencana tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dijabarkan dalam program Perangkat Daerah. Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) yang dituangkan dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan selain mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, juga mendukung terhadap pencapaian kinerja tujuan yaitu kualitas perencanaan yang lebih baik yang diukur dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang diwujudkan melalui kinerja sasaran yaitu Aspek Keselarasan, Aspek Kesesuaian, dan Aspek Keterhubungan.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda meliputi tata kelola kelembagaan yang dilaksanakan oleh Seketariat, perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2MP). Selain itu fungsi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah juga menjadi tugas dan fungsi Bappeda, dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Perencana yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan SDA; serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda didukung oleh Bidang P2MP, Bidang Perencana, serta Sekretariat. Sekretariat berperan dalam memberikan dukungan operasional, dukungan administrasi serta penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Bappeda.

Melalui seluruh rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut Bappeda diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang diukur dalam 3 aspek: (1) Aspek keselarasan, menghasilkan keselarasan pembangunan daerah (provinsi-kabupaten/kota) dengan nasional, (2) Aspek kesesuaian, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang diukur dari kualitas dokumen perencanaan yang tersusun, (3) Aspek keterhubungan, yaitu dukungan

kinerja perangkat daerah terhadap kinerja pembangunan daerah (Gubernur).

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah maka akan diimplementasikan dalam 3 program, 14 Kegiatan, dan 60 Sub kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah *												12.536.000.000		13.885.000.000		12.985.000.000		14.005.000.000		14.415.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) *	Angka	93,89	93,91	94,19		94,44		94,64		94,84		95,2		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah **											5.131.000.000		5.600.000.000		5.290.000.000		5.600.000.000		6.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Skor Aspek Sinergi dalam IPPN **	Angka	27,53	27,55	27,75	5.131.000.000	28	5.600.000.000	28,2	5.290.000.000	28,4	5.600.000.000	28,6	6.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH ***									270.000.000		500.000.000		300.000.000		600.000.000		1.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Pembangunan	
						Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah dengan Nasional	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah ***	%	N/A	79,12	80,31	270.000.000	81,52	500.000.000	82,74	300.000.000	83,98	600.000.000	85,24	1.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
		5.01.02.1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ****								270.000.000		500.000.000		300.000.000		600.000.000		1.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
						Meningkatnya kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan daerahnya selaras dengan nasional	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Yang Selaras Dengan Nasional ****	Kabupaten/Kota	N/A	25	27	270.000.000	30	500.000.000	30	300.000.000	32	600.000.000	35	1.000.000.000	POKJA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.03.0004			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota *****							270.000.000		500.000.000		300.000.000		600.000.000		1.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Pembangunan	
						Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi *****	Dokumen	70	105	70	270.000.000	70	500.000.000	70	300.000.000	70	600.000.000	105	1.000.000.000	POKJA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ***									2.041.000.000		2.200.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ***	%	N/A	79,3	80,49	2.041.000.000	81,71	2.200.000.000	82,93	2.150.000.000	84,17	2.150.000.000	85,43	2.150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		5.01.03.1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ****								2.041.000.000		2.200.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Terlaksananya keselarasan program prioritas daerah dengan kegiatan prioritas nasional bidang	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang	Angka	N/A	81,2	82,42	1.107.000.000	83,66	1.200.000.000	84,92	1.200.000.000	86,19	1.200.000.000	87,48	1.200.000.000	Pokja Pembangunan Manusia	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						pembangunan manusia	Pembangunan Manusia ****															
		5.01.03.1.01.0005			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *****							1.107.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *****	Dokumen	N/A	N/A	1	1.107.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	Pokja Pembangunan Manusia	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia JAWA TENGAH
						Terlaksananya keselarasan program prioritas daerah dengan kegiatan prioritas nasional bidang Pemerintahan	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan ****	Angka	N/A	77,4	78,56	934.000.000	79,75	1.000.000.000	80,94	950.000.000	82,15	950.000.000	83,39	950.000.000	Pokja Pemerintahan	
		5.01.03.1.01.0001			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *****							934.000.000		1.000.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *****	Dokumen	N/A	N/A	1	934.000.000	1	1.000.000.000	1	950.000.000	1	950.000.000	1	950.000.000	Pokja Pemerintahan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ***									1.220.000.000		1.300.000.000		1.240.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
						Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam ***	%	N/A	75,46	76,59	1.220.000.000	77,75	1.300.000.000	78,91	1.240.000.000	80,1	1.250.000.000	81,3	1.250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) ****								1.220.000.000		1.300.000.000		1.240.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
						Terlaksananya keselarasan program prioritas daerah dengan kegiatan prioritas nasional bidang SDA	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang SDA ****	Angka	N/A	76,55	77,7	350.000.000	78,87	400.000.000	80,05	350.000.000	81,25	350.000.000	82,47	350.000.000	Pokja Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02.0005			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *****							350.000.000		400.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Daya Alam	
						Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *****	Dokumen	N/A	N/A	1	350.000.000	1	400.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	Pokja Sumber Daya Alam	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam JAWA TENGAH
						Terlaksananya keselarasan program prioritas daerah dengan kegiatan prioritas nasional bidang Perekonomian	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Perekonomian ****	Angka	N/A	74,35	75,47	870.000.000	76,61	900.000.000	77,75	890.000.000	78,92	900.000.000	80,1	900.000.000	Pokja Perekonomian	
		5.01.03.1.02.0001			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *****							870.000.000		900.000.000		890.000.000		900.000.000		900.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
						Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *****	Dokumen	N/A	N/A	1	870.000.000	1	900.000.000	1	890.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	Pokja Perekonomian	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ***									1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ***	%	N/A	82,6	83,84	1.600.000.000	85,11	1.600.000.000	86,38	1.600.000.000	87,67	1.600.000.000	88,99	1.600.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		5.01.03.1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ****								1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Terlaksananya keselarasan program prioritas daerah dengan kegiatan prioritas nasional bidang Infrastruktur	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur ****	Angka	N/A	82,2	83,44	500.000.000	84,69	500.000.000	85,96	500.000.000	87,25	500.000.000	88,56	500.000.000	Pokja Infrastruktur	
		5.01.03.1.03.0001			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *****							500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *****	Dokumen	N/A	N/A	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	Pokja Infrastruktur	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan JAWA TENGAH
						Terlaksananya keselarasan program prioritas daerah dengan kegiatan prioritas	Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas	Angka	N/A	83	84,25	1.100.000.000	85,52	1.100.000.000	86,8	1.100.000.000	88,1	1.100.000.000	89,42	1.100.000.000	Pokja Kewilayahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						nasional bidang Kewilayahan	Nasional Bidang Kewilayahan ****															
		5.01.03.1.03.0005			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *****							1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *****	Dokumen	N/A	N/A	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	Pokja Kewilayahan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah **											3.805.000.000		4.685.000.000		4.095.000.000		4.305.000.000		4.315.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN **	Angka	56,36	56,36	56,44	3.805.000.000	56,44	4.685.000.000	56,44	4.095.000.000	56,44	4.305.000.000	56,6	4.315.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH ***									1.630.000.000		2.240.000.000		1.740.000.000		1.940.000.000		1.940.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya Perencanaan daerah yang berbasis data, hasil evaluasi dan risiko	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah ***	%	N/A	86	87,29	1.630.000.000	88,6	2.240.000.000	89,93	1.740.000.000	91,28	1.940.000.000	92,56	1.940.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
		5.01.02.1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan ****								200.000.000		500.000.000		300.000.000		500.000.000		500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
						Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Risiko	Jumlah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Perencanaan Berbasis Risiko ****	Urusan	N/A	36	37	200.000.000	38	500.000.000	39	300.000.000	40	500.000.000	42	500.000.000	POKJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.01.0002			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya *****							200.000.000		500.000.000		300.000.000		500.000.000		500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
						Sinkronnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan	Dokumen	N/A	N/A	2	200.000.000	2	500.000.000	2	300.000.000	2	500.000.000	3	500.000.000	POKJA PENYUSUNAN	Bidang Penyusunan Program,

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Pembangunan Daerah *****														PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan JAWA TENGAH
		5.01.02.1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ****								740.000.000		740.000.000		740.000.000		740.000.000		740.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
						Termanfaatkannya Hasil Analisis Data dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perumusan masalah berbasis Data ****	Urusan	N/A	36	37	740.000.000	38	740.000.000	39	740.000.000	40	740.000.000	42	740.000.000	POKJA ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.02.0001			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah *****							600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
						Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan	Dokumen	2	2	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	POKJA ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							Pembangunan Daerah) *****															
		5.01.02.1.02.0004			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi *****							140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
						Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan *****	Buku	1	1	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	POKJA ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan JAWA TENGAH
		5.01.02.1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ****								690.000.000		1.000.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
						Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hasil Evaluasi	Jumlah urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perumusan masalah berbasis hasil evaluasi ****	Urusan	N/A	36	37	690.000.000	38	1.000.000.000	39	700.000.000	40	700.000.000	42	700.000.000	POKJA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		5.01.02.1.03.0003			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah *****							690.000.000		1.000.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
						Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah *****	Laporan	N/A	2	2	690.000.000	3	1.000.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	3	700.000.000	POKJA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ***									490.000.000		750.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ***	%	N/A	87,76	89,08	490.000.000	90,42	750.000.000	91,77	650.000.000	93,15	650.000.000	94,55	650.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		5.01.03.1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemeri								490.000.000		750.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				ntahan dan Pembangunan Manusia ****																	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Meningkatnya perencanaan bidang pembangunan manusia berbasis data, hasil evaluasi dan risiko	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko ****	%	N/A	87,88	89,2	350.000.000	90,54	500.000.000	91,9	400.000.000	93,28	400.000.000	94,68	400.000.000	Pokja Pembangunan Manusia	
		5.01.03.1.01.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia *****							350.000.000		500.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia *****	Laporan	N/A	N/A	1	350.000.000	1	500.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	Pokja Pembangunan Manusia	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia JAWA TENGAH
						Meningkatnya perencanaan bidang pemerintahan berbasis data, hasil evaluasi dan risiko	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko ****	%	N/A	87,66	88,97	140.000.000	90,31	250.000.000	91,66	250.000.000	93,04	250.000.000	94,44	250.000.000	Pokja Pemerintahan	
		5.01.03.1.01.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan							140.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan *****																Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan *****	Laporan	N/A	N/A	1	140.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Pokja Pemerintahan	JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ***									1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
						Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam ***	%	N/A	84,49	85,76	1.100.000.000	87,05	1.100.000.000	88,35	1.100.000.000	89,68	1.100.000.000	91,02	1.100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) ****								1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya perencanaan bidang SDA berbasis data, hasil evaluasi dan risiko	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang SDA Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko ****	%	N/A	84,47	85,73	350.000.000	87,02	350.000.000	88,33	350.000.000	89,65	350.000.000	91	350.000.000	Pokja Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA *****							350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA *****	Laporan	N/A	N/A	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	Pokja Sumber Daya Alam	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam JAWA TENGAH
						Meningkatnya perencanaan bidang perekonomian berbasis data, hasil evaluasi dan risiko	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko ****	%	N/A	84,53	85,79	750.000.000	87,08	750.000.000	88,39	750.000.000	89,72	750.000.000	91,06	750.000.000	Pokja Perekonomian	
		5.01.03.1.02.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian *****							750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Laporan	N/A	N/A	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	Pokja Perekonomian	Bidang Perekonomian dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian *****															Sumber Daya Alam JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ***									585.000.000		595.000.000		605.000.000		615.000.000		625.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ***	%	N/A	85,75	87,03	585.000.000	88,34	595.000.000	89,66	605.000.000	91,01	615.000.000	92,38	625.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		5.01.03.1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ****								585.000.000		595.000.000		605.000.000		615.000.000		625.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Meningkatnya perencanaan bidang kewilayahan berbasis data, hasil evaluasi dan risiko	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kewilayahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko ****	%	N/A	85,72	87,01	410.000.000	88,31	420.000.000	89,64	430.000.000	90,99	440.000.000	92,35	450.000.000	Pokja Kewilayahan	
		5.01.03.1.03.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi							410.000.000		420.000.000		430.000.000		440.000.000		450.000.000	Badan Perencanaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan *****																Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan *****	Laporan	N/A	N/A	1	410.000.000	1	420.000.000	1	430.000.000	1	440.000.000	1	450.000.000	Pokja Kewilayahan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan JAWA TENGAH
						Meningkatnya perencanaan bidang infrastruktur berbasis data, hasil evaluasi dan risiko	Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Infrastruktur Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko ****	%	N/A	85,77	87,06	175.000.000	88,36	175.000.000	89,69	175.000.000	91,04	175.000.000	92,4	175.000.000	Pokja Infrastruktur	
		5.01.03.1.03.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur *****								175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur *****	Laporan	N/A	N/A	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	Pokja Infrastruktur	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Daerah **											3.600.000.000		3.600.000.000		3.600.000.000		4.100.000.000		4.100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Skor Aspek Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja **	Angka	10	10	10	3.600.000.000	10	3.600.000.000	10	3.600.000.000	10	4.100.000.000	10	4.100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH ***									3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
						Meningkatnya Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah dengan Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah Dengan Kinerja Daerah ***	%	N/A	98,55	98,74	3.000.000.000	98,86	3.000.000.000	98,98	3.000.000.000	99,1	3.500.000.000	99,22	3.500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
		5.01.02.1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan ****								3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					nan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
						Terfasilitasinya penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Cascading	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun penjenjangan kinerja selaras dengan kinerja daerah ****	OPD	43	43	43	3.000.000.000	43	3.000.000.000	43	3.000.000.000	43	3.500.000.000	43	3.500.000.000	POKJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.01.0006			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi *****							3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
						Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) *****	Dokumen	N/A	3	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.500.000.000	3	3.500.000.000	POKJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ***									200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang	%	N/A	98,88	99,07	200.000.000	99,19	200.000.000	99,31	200.000.000	99,43	200.000.000	99,55	200.000.000	Badan Perencanaan Pembang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ***															unan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		5.01.03.1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ****								200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Meningkatnya keterhubungan kinerja sektoral bidang pembangunan manusia dengan kinerja daerah	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan kinerja daerah ****	%	N/A	99,15	99,34	100.000.000	99,47	100.000.000	99,59	100.000.000	99,71	100.000.000	99,83	100.000.000	Pokja Pembangunan Manusia	
		5.01.03.1.01.0006			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia *****	Laporan	N/A	N/A	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Pokja Pembangunan Manusia	JAWA TENGAH
						Meningkatnya keterhubungan kinerja sektoral bidang pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan yang selaras	%	N/A	98,61	98,8	100.000.000	98,92	100.000.000	99,04	100.000.000	99,16	100.000.000	99,28	100.000.000	Pokja Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						dengan kinerja daerah	dengan kinerja daerah ****															
		5.01.03.1.01.0002			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan *****	Laporan	N/A	N/A	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Pokja Pemerintahan	JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ***									200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
						Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam ***	%	N/A	97,65	97,84	200.000.000	97,96	200.000.000	98,08	200.000.000	98,2	200.000.000	98,32	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Pereko								200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				nomian dan SDA (Sumber Daya Alam) ****																	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
						Meningkatnya keterhubungan kinerja sektoral bidang SDA dengan kinerja daerah	Persentase Capaian Kinerja Bidang SDA yang selaras dengan kinerja daerah ****	%	N/A	97,55	97,74	100.000.000	97,85	100.000.000	97,97	100.000.000	98,09	100.000.000	98,21	100.000.000	Pokja Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02.0006			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
						Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA *****	Laporan	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Pokja Sumber Daya Alam	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam JAWA TENGAH
						Meningkatnya keterhubungan kinerja sektoral bidang perekonomian dengan kinerja daerah	Persentase Capaian Kinerja Bidang Perekonomian yang selaras dengan kinerja daerah ****	%	N/A	97,71	97,9	100.000.000	98,02	100.000.000	98,14	100.000.000	98,26	100.000.000	98,38	100.000.000	Pokja Perekonomian	
		5.01.03.1.02.0002			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian *****	Laporan	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Pokja Perekonomian	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ***									200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ***	%	N/A	99,1	99,29	200.000.000	99,41	200.000.000	99,53	200.000.000	99,65	200.000.000	99,77	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		5.01.03.1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ****								200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Meningkatnya keterhubungan kinerja sektoral bidang infrastruktur dengan kinerja daerah	Persentase Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur yang selaras dengan kinerja daerah ****	%	N/A	99,53	99,73	100.000.000	99,75	100.000.000	99,77	100.000.000	99,79	100.000.000	99,81	100.000.000	Pokja Infrastruktur	
		5.01.03.1.03.0002			Asistensi Penyusunan Dokumen							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Badan Perencanaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur *****																Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur *****	Laporan	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Pokja Infrastruktur	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan JAWA TENGAH
						Meningkatnya keterhubungan kinerja sektoral bidang kewilayahan dengan kinerja daerah	Persentase Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan yang selaras dengan kinerja daerah ****	%	N/A	98,56	98,75	100.000.000	99,07	100.000.000	99,3	100.000.000	99,52	100.000.000	99,74	100.000.000	Pokja Kewilayahan	
		5.01.03.1.03.0006			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan *****	Laporan	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Pokja Kewilayahan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berinte												34.039.825.000		37.702.080.000		39.088.151.000		41.684.013.000		43.671.397.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
gritas dan dinamis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah *																						
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah *	Angka	82,41	72,5	82,5		82,75		83		83,25		84		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah **											600.000.000		620.000.000		640.000.000		660.013.000		680.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah **	Angka	3,05	2,92	3,1	600.000.000	3,15	620.000.000	3,2	640.000.000	3,25	660.013.000	3,3	680.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									600.000.000		620.000.000		640.000.000		660.013.000		680.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ***	%	100	100	100	600.000.000	100	620.000.000	100	640.000.000	100	660.013.000	100	680.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								600.000.000		620.000.000		640.000.000		660.013.000		680.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	100	600.000.000	100	620.000.000	100	640.000.000	100	660.013.000	100	680.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							300.000.000		310.000.000		320.000.000		330.000.000		340.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	4	4	4	300.000.000	4	310.000.000	4	320.000.000	4	330.000.000	4	340.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							295.000.000		305.000.000		314.000.000		324.000.000		334.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	12	12	12	295.000.000	12	305.000.000	12	314.000.000	12	324.000.000	12	334.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik							5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.013.000		6.000.000	Badan Perencanaan Pembang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Sektoral Daerah *****																unan Daerah	
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.013.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah **											33.439.825.000		37.082.080.000		38.448.151.000		41.024.000.000		42.991.397.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah **	Angka	94	84,25	94,25	33.439.825.000	94,5	37.082.080.000	95	38.448.151.000	95,1	41.024.000.000	95,2	42.991.397.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									33.439.825.000		37.082.080.000		38.448.151.000		41.024.000.000		42.991.397.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ***	%	100	100	100	33.439.825.000	100	37.082.080.000	100	38.448.151.000	100	41.024.000.000	100	42.991.397.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								21.925.825.000		23.603.080.000		23.352.151.000		27.400.000.000		28.880.397.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	1	1	1	21.925.825.000	1	23.603.080.000	1	23.352.151.000	1	27.400.000.000	1	28.880.397.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							21.225.785.000		22.778.080.000		22.542.151.000		26.500.000.000		27.975.397.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	117	116	118	21.225.785.000	125	22.778.080.000	130	22.542.151.000	130	26.500.000.000	130	27.975.397.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							350.040.000		400.000.000		360.000.000		400.000.000		400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	350.040.000	12	400.000.000	12	360.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							200.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	12	12	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan							100.000.000		100.000.000		125.000.000		125.000.000		130.000.000	Badan Perencanaan Pembang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Keuangan Akhir Tahun SKPD *****																unan Daerah	
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	12	12	12	50.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	260.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****							60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	2	2	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								440.000.000		450.000.000		337.000.000		450.000.000		487.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	440.000.000	100	450.000.000	100	337.000.000	100	450.000.000	100	487.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							77.000.000		0		77.000.000		0		77.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	1	77.000.000	N/A	0	1	77.000.000	N/A	0	1	77.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan							138.000.000		200.000.000		160.000.000		200.000.000		160.000.000	Badan Perencanaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Administrasi Kepegawaian *****																Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	1	1	138.000.000	1	200.000.000	1	160.000.000	1	200.000.000	1	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							225.000.000		250.000.000		100.000.000		250.000.000		250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	30	30	35	225.000.000	35	250.000.000	40	100.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								2.960.000.000		3.205.000.000		3.325.000.000		3.530.000.000		3.770.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	2.960.000.000	100	3.205.000.000	100	3.325.000.000	100	3.530.000.000	100	3.770.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							160.000.000		200.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000	Badan Perencanaan Pembang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					unan Daerah	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	160.000.000	1	200.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							230.000.000		240.000.000		250.000.000		260.000.000		270.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	230.000.000	1	240.000.000	1	250.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	40.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							190.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan	4	4	4	190.000.000	4	200.000.000	4	210.000.000	4	220.000.000	4	230.000.000	SUB BAGIAN UMUM	JAWA TENGAH<br

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							Kunjungan Tamu *****														DAN KEPEGAWAIAN	>OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							1.050.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	1.050.000.000	4	1.100.000.000	4	1.150.000.000	4	1.200.000.000	4	1.250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							70.000.000		95.000.000		120.000.000		145.000.000		170.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	1	1	1	70.000.000	1	95.000.000	1	120.000.000	1	145.000.000	1	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							1.050.000.000		1.150.000.000		1.210.000.000		1.310.000.000		1.450.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	1	1	1	1.050.000.000	1	1.150.000.000	1	1.210.000.000	1	1.310.000.000	1	1.450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah								1.250.000.000		2.050.000.000		4.000.000.000		1.800.000.000		2.100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Daerah ****																		
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	5	4	1.250.000.000	6	2.050.000.000	9	4.000.000.000	4	1.800.000.000	5	2.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							0		0		2.250.000.000		0		0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	5	2.250.000.000	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		300.000.000		0		0		100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	N/A	0	1	300.000.000	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							250.000.000		250.000.000		150.000.000		300.000.000		250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	150.000.000	1	300.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							700.000.000		1.000.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	2	2	700.000.000	3	1.000.000.000	2	900.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							300.000.000		500.000.000		700.000.000		500.000.000		750.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	1	300.000.000	1	500.000.000	1	700.000.000	1	500.000.000	1	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								4.050.000.000		4.700.000.000		4.500.000.000		4.600.000.000		4.700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1	1	1	4.050.000.000	1	4.700.000.000	1	4.500.000.000	1	4.600.000.000	1	4.700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							1.050.000.000		1.500.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	1.050.000.000	12	1.500.000.000	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan							3.000.000.000		3.200.000.000		3.400.000.000		3.500.000.000		3.600.000.000	Badan Perencanaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Umum Kantor *****																Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	3.000.000.000	12	3.200.000.000	12	3.400.000.000	12	3.500.000.000	12	3.600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								2.554.000.000		2.814.000.000		2.674.000.000		2.984.000.000		2.794.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	57	57	57	2.554.000.000	57	2.814.000.000	57	2.674.000.000	57	2.984.000.000	57	2.794.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	39	39	39	650.000.000	39	650.000.000	39	650.000.000	39	650.000.000	39	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Badan Perencanaan Pembang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					unan Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	3	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							300.000.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	8	8	8	300.000.000	8	350.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	2	2	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							250.000.000		260.000.000		270.000.000		280.000.000		290.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit	2	2	2	250.000.000	2	260.000.000	2	270.000.000	2	280.000.000	2	290.000.000	SUB BAGIAN UMUM	JAWA TENGAH<br

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****														DAN KEPEGAWAIAN	>OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							300.000.000		500.000.000		300.000.000		600.000.000		300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	2	2	2	300.000.000	2	500.000.000	2	300.000.000	2	600.000.000	2	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tabel 4.2
Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam
Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Melakukan fasilitasi pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN	Pengalokasian anggaran kenaikan TPP ASN pada Tahun ke-3 RPJMD	▪ Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ▪ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan ▪ Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi ▪ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ▪ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	▪ Bidang Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; ▪ Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; ▪ Sekretariat.	▪ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah; ▪ Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah; ▪ Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; ▪ Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pembangunan Manusia ▪ Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
2	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	▪ Melakukan fasilitasi dan koordinasi pembentukan kelembagaan melalui produk hukum ▪ Identifikasi potensi kawasan aglomerasi	▪ Identifikasi Potensi kawasan Aglomerasi di Tahun 2025 ▪ Terbentuknya kelembagaan aglomerasi di Tahun 2026	▪ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ▪ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ▪ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	▪ Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; ▪ Bidang Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; ▪ Bidang Perekonomian dan SDA; ▪ Sekretariat.	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; ▪ Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah; ▪ Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Menyusun Peraturan Daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	▪ Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penerapan Ekonomi Hijau ▪ Penyusunan *road map* tentang Ekonomi Hijau	▪ Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Ekonomi Hijau pada Tahun 2027 ▪ Tersusunnya *road map* tentang ekonomi hijau pada Tahun 2025	▪ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ▪ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) ▪ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	▪ Bidang Perekonomian dan SDA; ▪ Bidang Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; ▪ Sekretariat.	▪ Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah; ▪ Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah; ▪ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah; ▪ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja juga merupakan unjuk kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu program/kegiatan atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Kinerja harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam bentuk *impact*, *outcome*, atau *output* (Permendagri 86/2017).

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal atau indikasi apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang SMART (*Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, Time Bound*) + C (*Continuously Improved*) akan memberikan indikasi yang lebih baik dan menggambarkan mengenai kinerja organisasi sesungguhnya.

Selain itu, apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang memadai maka akan memandu dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*). Indikator kinerja berperan penting dalam proses perencanaan, pengendalian, evaluasi hingga pelaporan kinerja.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RJMPD.

Tabel 4.3.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian Tahunan						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	91,51	93,89	93,91	94,19	94,44	94,64	94,84	95,20	
2	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	72,4	82,41	72,5	82,5	82,75	83	83,25	84	

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Kunci

NO	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahunan						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Program Prioritas Nasional Yang Didukung Program Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 4.5.

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja SPM	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Nihil									

Bappeda tidak melaksanakan pelayanan dasar sebagaimana perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelayanan dasar, sehingga Bappeda tidak terkait/melaksanakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai acuan kinerja dan ukuran keberhasilan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah juga memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 telah selaras dengan tujuan daerah yaitu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan dan sasaran I daerah yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah.

Dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 telah berpedoman pada Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagai catatan penting guna menunjang keberhasilan pelaksanaaan Renstra ini menghadapi berbagai ketidakpastian termasuk alokasi anggaran, maka perlu adanya kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta komitmen semua unsur. Penyesuaian Organisasi dan tata kelola Bappeda Provinsi Jawa Tengah menjadi penting agar proses perencanaan dapat berkesinambungan, dimulai dari penyusunan dan penjenjangan kinerja yang tertuang dalam Renstra hingga distribusi pertanggungjawaban kinerja organisasi dan individu melalui Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu (IKI).

Renstra Bappeda akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda maupun dasar dari Evaluasi Kinerja Bappeda tahun hingga Tahun 2029 mendatang. Sebagai tindak lanjut demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, Bappeda perlu melakukan Diseminasi Renstra Bappeda 2025 - 2029 serta monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya.

Lampiran

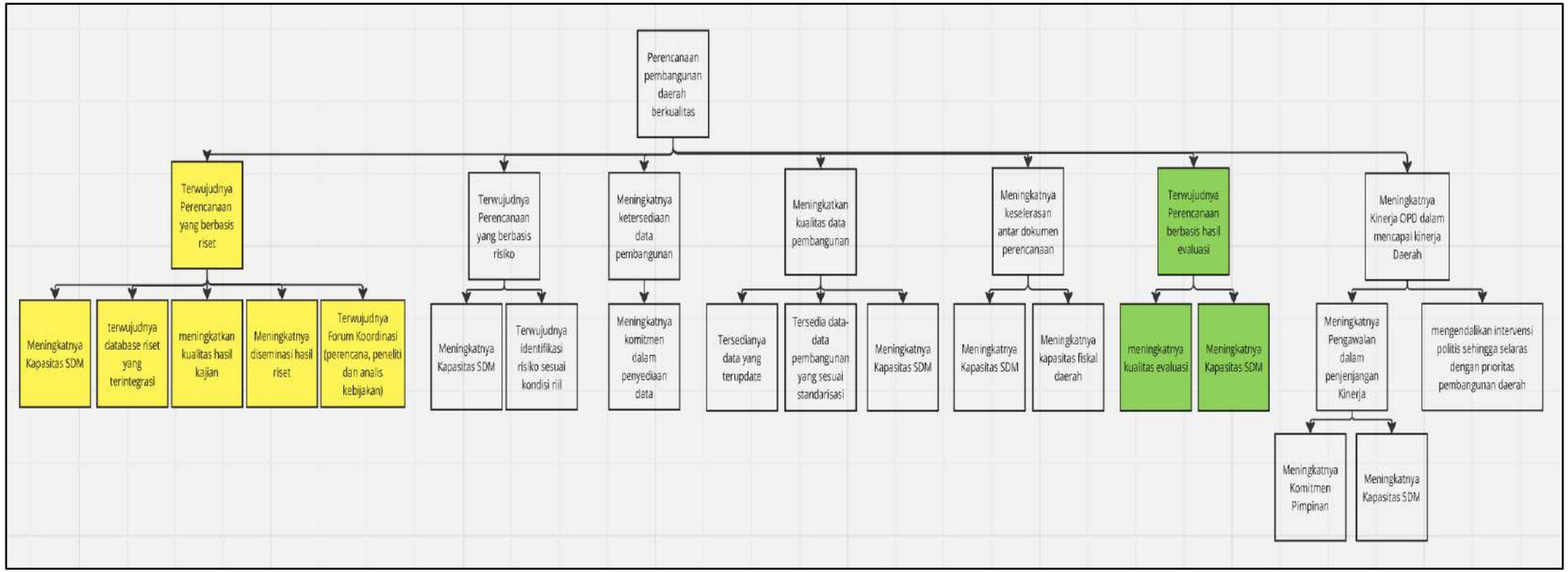

Lampiran 1. Pohon Kinerja

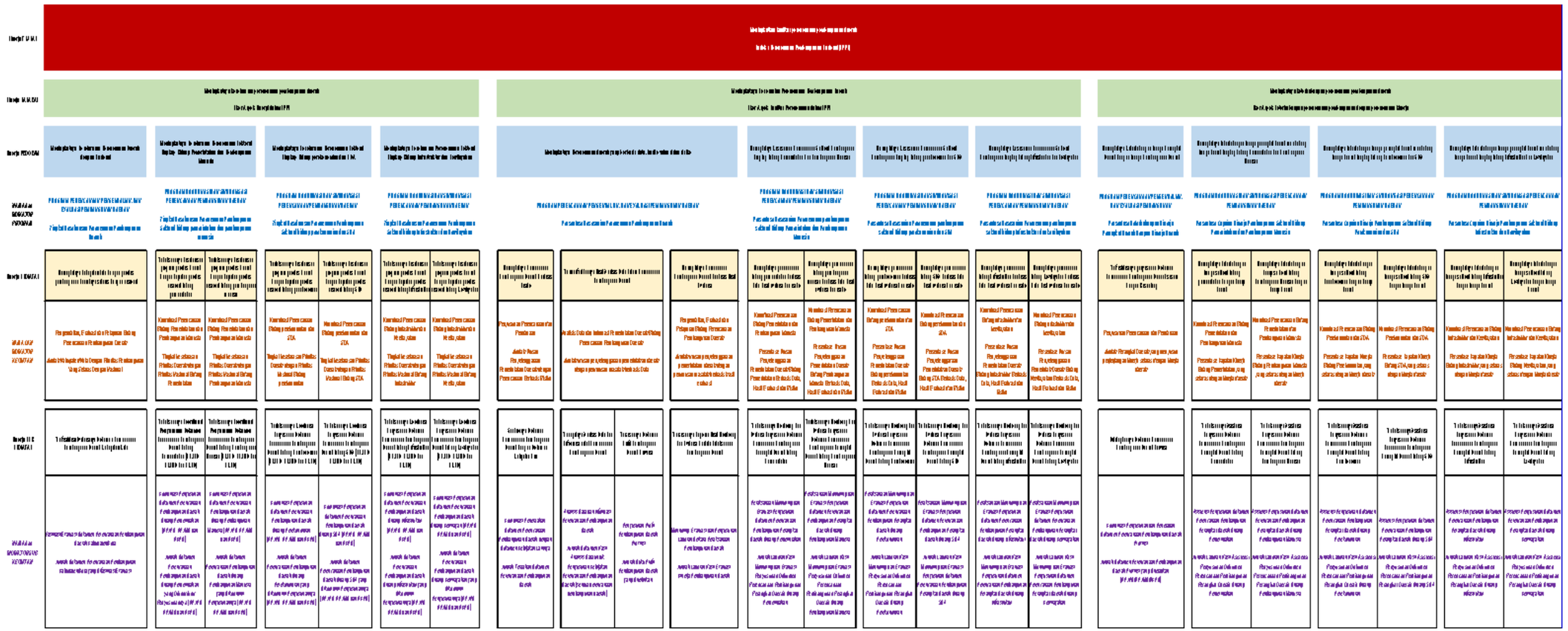

Lampiran 2. Cascading

Lampiran 3. Tabel Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Skor Aspek Sinergi dalam IPPN	Terjadinya disharmoni antara perencanaan daerah dan prioritas pembangunan nasional	Risiko Strategis	1. Dinamika kebijakan pusat yang berubah-ubah 2. Kebijakan KDH yang fokus pada kepentingan di daerah 3. Komunikasi antara pemerintah pusat ke Provinsi serta Provinsi ke Kab/kota kurang optimal 4. Kepentingan atau ego sektoral di pemerintah pusat 5. Siklus perencanaan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah	Tidak tercapainya sasaran pembangunan daerah	1. Masyarakat Jawa Tengah 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Skor Aspek Sinergi dalam IPPN	Perubahan Kebijakan Pembangunan di Tingkat Pusat yang Tidak Tersosialisasi Secara Cepat	Risiko Strategis	1. Mekanisme komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak efisien, sering kali bergantung pada surat resmi atau pertemuan berkala 2. Keterlambatan penerbitan peraturan teknis atau petunjuk operasional dari	Perencanaan pembangunan daerah menjadi tidak sejalan dengan prioritas nasional	1. Masyarakat Jawa Tengah 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
						kementerian/lembaga terkait		
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah	Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN	Perencanaan pembangunan daerah tidak memperhatikan substansi antar bagian	Risiko Strategis	1. Kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan dokumen 2. Kurangnya data yang cukup memadai 3. Hasil evaluasi belum digunakan sebagai bahan perencanaan	Perencanaan Pembangunan tidak berkualitas	1. Masyarakat Jawa Tengah 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya keterhubungan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan kinerja	Skor Aspek Keterhubungan dalam IPPN	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah tidak mendukung kinerja pembangunan daerah	Risiko Strategis	1. Dinamika kebijakan perubahan tusi atau perangkat daerah yang mempengaruhi cascading 2. Kurangnya pemahaman SDM perencana dalam Menyusun cascading (penjenjangan Kinerja) 3. Kurangnya koordinasi dengan OPD ampuan	Sasaran pembangunan tidak terlaksana	1. Masyarakat Jawa Tengah 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 4. Tabel Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Terjadinya disharmoni antara perencanaan daerah dan prioritas pembangunan nasional	5	4	20	Ada	1. Menyusun Surat Edaran Kebijakan dan Penyelarasan Kebijakan 2. Pembinaan kepada daerah melalui rapat koordinasi rutin pemprov dan kab/kota 3. Melaksanakan evaluasi/fasilitasi terhadap perencanaan kabupaten/kota 4. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat 5. Mengikuti tahapan forum perencanaan	Memadai	3	4	12
Perubahan Kebijakan Pembangunan di Tingkat Pusat yang Tidak Tersosialisasi Secara Cepat	2	4	8	Ada	Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat	Memadai	2	3	6
Perencanaan pembangunan daerah tidak memperhatikan substansi antar bagian	4	4	16	Ada	1. Melaksanakan konsinyering penyusunan dokumen perencanaan 2. Melaksanakan fasilitasi dokumen perencanaan kepada kemendagri 3. Melaksanakan Desk Verifikasi 4. Melakukan reviu dokumen perencanaan oleh eksternal bappeda	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
					5. Koordinasi terkait hasil evaluasi				
Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah tidak mendukung kinerja pembangunan daerah	3	3	9	Ada	1. Bersinergi dengan penanggung jawab organisasi dan tatalaksana pemerintah daerah 2. Melaksanakan FGD perumusan penjenjangan kinerja 3. Peningkatan koordinasi dengan OPD ampuan 4. Desk Verifikasi penjenjangan kinerja 5. Koordinasi dengan pemerintah pusat	Memadai	2	3	6

Lampiran 5. Tabel Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	**Skala Risiko**	**Pemilik Risiko**	**Sebab**	**Dampak**
Terjadinya disharmoni antara perencanaan daerah dan prioritas pembangunan nasional	12	Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah	1. Dinamika kebijakan pusat yang berubah-ubah 2. Kebijakan KDH yang fokus pada kepentingan di daerah 3. Komunikasi antara pemerintah pusat ke Provinsi serta Provinsi ke Kab/kota kurang optimal 4. Kepentingan atau ego sektoral di pemerintah pusat 5. Siklus perencanaan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah	Tidak tercapainya sasaran pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan daerah tidak memperhatikan substansi antar bagian	12	Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah	1. Kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan dokumen 2. Kurangnya data yang cukup memadai 3. Hasil evaluasi belum digunakan sebagai bahan perencanaan	Perencanaan Pembangunan tidak berkualitas

Lampiran 6. Tabel Rencana Tindak Pengendalian

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Skor Aspek Sinergi dalam IPPN	Terjadinya disharmoni antara perencanaan daerah dan prioritas pembangunan nasional	12	1. Dinamika kebijakan pusat yang berubah-ubah 2. Kebijakan KDH yang fokus pada kepentingan di daerah 3. Komunikasi antara pemerintah pusat ke Provinsi serta Provinsi ke Kab/kota kurang optimal 4. Kepentingan atau ego sektoral di pemerintah pusat 5. Siklus perencanaan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah	Tidak tercapainya sasaran pembangunan daerah	Melaksanakan Koordinasi intensif dengan Pusat dan Kabupaten Kota baik dalam bentuk rapat koordinasi maupun forum perencanaan tambahan.	Kepala Bappeda	2025-2029
Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah	Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN	Perencanaan pembangunan daerah tidak memperhatikan substansi antar bagian	12	1. Kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan dokumen 2. Kurangnya data yang cukup memadai 3. Hasil evaluasi belum digunakan sebagai bahan perencanaan	Perencanaan Pembangunan tidak berkualitas	1. Memperkuat kompetensi SDM perencana daerah melalui pelatihan, sertifikasi ataupun	Kepala Bappeda	2025-2029

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
						kemitraan akademik 2. Penguatan Penyediaan Data dan Peningkatan kualitas data Pembangunan 3. Menganalisis hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya 4. Memperhatikan dan menindaklanjuti hasil review APIP		

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (Tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah BRIDA Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan FungsiPenunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu selama 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin akan muncul, sebagai langkah awal dalam menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dalam bentuk potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 272 menjelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangat daerah, dimana Renstra PD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan.

Fungsi dilaksanakannya penyusunan Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan sektor dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing, yang berorientasi pada proses dengan melalui tahapan : 1. Teknokratik (dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran); 2. Partisipatif (melibatkan berbagai pemangku kepentingan); 3. Politis (dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih); 4. Konsep atas-bawah dan bawah-atas.

Penyusunan Renstra dilakukan dengan pendekatan: a. Holistik-tematik (mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/ atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, b. Integratif (menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah); dan c. Spasial (mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan).

Dalam penyusunan Renstra, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertajam tujuan dan sasaran serta memperjelas strategi dan arah kebijakan agar dapat dituangkan ke dalam program/ kegiatan yang implementatif. Untuk itu, perencanaan yang terkonsep dan tersusun dengan baik sangat berpengaruh demi mencapai hasil yang optimal di masa mendatang.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Persiapan Penyusunan Renstra

   Persiapan penyusunan renstra meliputi:

   a. Penyusunan rancangan keputusan tentang pembentukan tim penyusunan Renstra;
   b. Orientasi mengenai Renstra;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun renstra; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

   Tahap I

   a. Penyusunan pohon kinerja;
   b. cascading perangkat daerah; dan
   c. manajemen risiko perangkat daerah

   Tahap II

   penyusunan dokumen rancangan awal Renstra PD, sesuai dengan

sistematika yang ditetapkan;

3. Rancangan Awal Renstra disempurnakan melalui Forum Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam Berita Acara, memuat penajaman terhadap target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan lokasi.
4. Penyusunan Rancangan Renstra

   Rancangan Renstra merupakan hasil penyempurnaan Rancangan Awal Renstra setelah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam Berita Acara Rancangan Renstra disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD. Verifikasi oleh Bappeda terhadap Rancangan Renstra bertujuan untuk memastikan Rancangan Renstra telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra

   Perumusan Rancangan Akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra berdasarkan Peraturan Daerah RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah RPJMD.
6. Penetapan Renstra

   Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah RPJMD ditetapkan. Verifikasi dilakukan untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam Renstra selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan Akhir Renstra yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan proses

penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah RPJMD ditetapkan. Renstra yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan bersifat sektoral yang disusun berpedoman kepada RPJMD, sebagai bentuk penjabaran RPJMD, sedangkan kaitannya dengan Renstra K/L dan Kabupaten/Kota adalah bersifat sinergi. Selanjutnya hubungan Renstra dengan Renja adalah Renstra merupakan acuan dalam penyusunan Renja sebagai satu bentuk kesatuan perencanaan perangkat daerah.

Tantangan pembangunan Jawa Tengah ke depan semakin kompleks, ditandai oleh tuntutan percepatan transformasi ekonomi berbasis inovasi, penguatan daya saing daerah, peningkatan ketahanan sosial-ekologis, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029, riset dan inovasi ditetapkan sebagai salah satu pilar pendukung untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh karena itu, BRIDA diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), mendorong inovasi daerah, serta memperkuat sistem informasi dan pengetahuan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan.

Dokumen Renstra BRIDA 2025–2029 ini disusun secara teknokratik dengan pendekatan holistik dan partisipatif, berdasarkan

data dan analisis yang komprehensif terhadap isu strategis, potensi, dan tantangan pembangunan daerah. Renstra ini menjadi acuan dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan BRIDA selama lima tahun ke depan, yang bertujuan untuk memperkuat kontribusi riset dan inovasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kerangka perencanaan nasional dan daerah. Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
15. Peraturan Kepala BRIN Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022 – 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2);
18. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID) Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi BRIDA Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029 serta pedoman pembangunan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi daerah bagi para pemangku kepentingan baik unsur pemerintah, akademisi, swasta, serta masyarakat agar lebih efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan .

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BRIDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai badan yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan dan menangani urusan penelitian dan pengembangan;
b. Menetapkan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan serta strategi dan arah kebijakan pembangunan BRIDA Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
c. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BRIDA Provinsi Jawa Tengah;
d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan urusan bidang penelitian dan pengembangan di BRIDA Provinsi Jawa Tengah baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang (pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD, dan dengan Renja PD), Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Memuat tentang peran (tugas dan fungsi) Badan riset dan inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki BRIDA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui Renstra BRIDA ini; Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah serta berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah. Permasalahan yang teridentifikasi harus dapat dijawab melalui strategi, arah kebijakan, dan kinerja

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran didapatkan dari kertas kerja cascading perangkat daerah yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya juga memuat tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan BRIDA Provinsi Jawa Tengah.

Serta memuat Manajemen Strategis yang merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi

risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan perangkat daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/ fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan memperhatikan pohon kinerja dan cascading yang sudah disusun.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja BRIDA Prov. Jateng;
2. Cascading BRIDA Prov. Jateng;
3. Manajemen Risiko BRIDA Prov. Jateng.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan di Tahun 2025 - 2029, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sumberdaya dan modal awal dari capaian pelaksanaan Renstra dan program prioritas dalam RPD periode sebelumnya Tahun 2024 - 2026, meskipun di dalam implementasinya masih menghadapi hambatan-hambatan yang perlu penanganan atau penyelesaian lebih lanjut.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah terbentuk Tahun 2023 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Sebelumnya organisasi kelitbangan yang sepanjang sejarahnya telah mengalami berbagai metamorfosa bentuk dimulai dari tahun 1990-an dengan nomenklatur Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Jawa Tengah kemudian Tahun 2001 menjadi Balitbang Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2017 bergabung dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebagai Bidang Kelitbangan dan UPP IPTEK, berubah lagi Tahun 2019 menjadi 2 bidang yaitu Bidang Riset dan Pengembangan serta Bidang Inovasi Teknologi, Tahun 2021 sebagai UPT BRIDA Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan mulai Tahun 2023 menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penelitian dan pengembangan memiliki peran yang penting untuk mendorong pecepatan pembangunan daerah. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang Penelitian dan Pengembangan untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem Penelitian dan Pengembangan daerah.

Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah suatu sistem yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 386. Inovasi daerah yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan inisiatif pemerintah daerah dan dinilai oleh pemerintah pusat dengan memanfaatkan lembaga penelitian dan pengembangan daerah. Selain itu Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang merupakan penyempurnaan dari 3 pedoman kelitbangan sebelumnya, yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2011; Permendagri Nomor 14 Tahun 2014; dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2014. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan di lingkup pemerintahan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan yang ditetapkan, secara efektif diimplementasikan dan saling bersinergi untuk meminimalkan adanya tumpang tindih regulasi. Dengan demikian Penelitian dan Pengembangan daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam Penelitian dan Pengembangan nasional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, BRIDA merupakan unsur penunjang pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b. Penyusunan perencanaan program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Riset dan Inovasi, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta invensi dan Inovasi di Daerah;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
f. Pelaksanaan pembangunan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah;
h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Di dalam Bab III Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri dari: 1) Sub bagian Program; 2) Sub bagian Keuangan; 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur bagan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

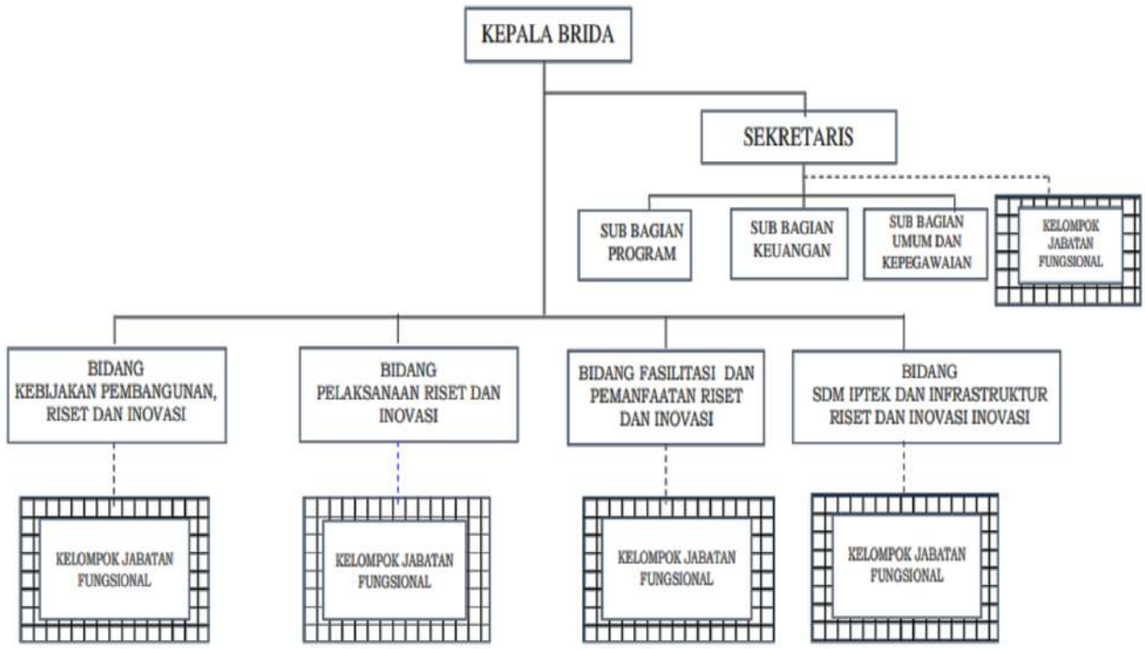

Gambar 2.1 Struktur BRIDA JATENG

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRIDA Prov. Jateng

Tugas dan Fungsi Bidang

Sebagaimana di atas, masing-masing unsur dari organisasi BRIDA memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

A. Sekretaris

1. Tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BRIDA.
2. Fungsi
   a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan BRIDA;
   b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan BRIDA;
   c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang Organisasi, Ketatausahaan dan Tata Laksana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, Kearsipan dan Perpustakaan di lingkungan BRIDA;
   d. Penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi di lingkungan BRIDA;
   e. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BRIDA;

f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan BRIDA; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu Program, Keuangan, dan Umum dan Kepegawaian, dengan tugas:
   a. Sub bagian Program bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang Program;
   b. Sub bagian Keuangan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan;
   c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

B. Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi

1. Tugas Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi bertugas menyiapkan rencana kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan penyusunan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi.

2) Fungsi
   a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Pembangunan;
   b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; dan
   c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Tugas dalam pelaksanaan Fungsi

Tugas dalam pelaksanaan fungsi di bidang Kebijakan Pembangunan meliputi:
   a. Menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan Daerah;
   b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perumusan kebijakan pembangunan Daerah;
   c. Menyiapkan kajian permasalahan dan isu strategis Daerah;
   d. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip perencanaan pembangunan Daerah;
   e. Menyiapkan pengawasan pelaksanaan penyusunan rekomendasi arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan Daerah;
   f. Menyiapkan sosialisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan Daerah;
   g. Menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dalam pelaksanaan fungsi di bidang Kebijakan Riset dan Inovasi meliputi:

a. Menyiapkan perumusan dan penetapan kebijakan riset dan inovasi di Daerah;
b. Menyiapkan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan kebijakan riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
c. Menyiapkan pelaksanaan pengukuran dan indikator riset dan inovasi di Daerah;
d. Menyiapkan sosialisasi dan pengendalian kebijakan riset dan inovasi di Daerah;
e. Menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi di Daerah; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi

1. Tugas Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi bertugas, menyiapkan rencana kerja, pelaksanaan kebijakan, pembinaan pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian dukungan administrasi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah.
2. Fungsi
   a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Riset di Daerah;
   b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Inovasi di Daerah; dan
   c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Tugas dalam pelaksanaan Fungsi, Tugas Dalam fungsi pelaksanaan riset meliputi:
   a. Menyiapkan rencana kerja riset dan pengembangan di Daerah;
   b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan pengembangan di Daerah;
   c. Menyiapkan pelaksanaan riset dan pengembangan di Daerah;
   d. Menyiapkan pembinaan pelaksanaan riset dan pengembangan di Daerah;

e. Menyiapkan sosialisasi dan pengendalian riset dan pengembangan di Daerah;
f. Menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan riset dan pengembangan di Daerah; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tugas dalam fungsi pelaksanaan inovasi meliputi:
a. Menyiapkan rencana kerja invensi dan inovasi;
b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan invensi dan inovasi di Daerah;
c. Menyiapkan pelaksanaan invensi dan inovasi di Daerah;
d. Menyiapkan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di Daerah;
e. Menyiapkan sosialisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di Daerah;
f. Menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan invensi dan inovasi; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi

1. Tugas Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi bertugas menyiapkan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah.
2. Fungsi
a. Penyiapan rencana kerja, koordinasi dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi di Daerah;
b. Penyiapan rencana kerja, koordinasi dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Tugas dalam pelaksanaan fungsi

Tugas dalam pelaksanaan fungsi Fasilitasi Riset dan Inovasi meliputi:

a. Menyiapkan rencana kerja di bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi di Daerah;
b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Fasilitasi Riset dan Inovasi di Daerah;
c. Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah;

d. Menyiapkan pelaksanaan dana imbal hasil, dana abadi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di Daerah;
e. Menyiapkan pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual di Daerah;
f. Menyiapkan rekomendasi pelaksanaan perizinan riset dan inovasi di Daerah;
g. Menyiapkan pelaksanaan repositori ilmiah di Daerah;
h. Menyiapkan pelaksanaan multimedia dan penerbitan ilmiah di Daerah;
i. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Fasilitasi Riset dan Inovasi di Daerah;
j. Menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan Fasilitasi Riset dan Inovasi; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dalam pelaksanaan fungsi Pemanfaatan Riset dan Inovasi dengan tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan rencana kerja di bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah;
b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah;
c. Menyiapkan pelaksanaan alih teknologi di Daerah; d. Menyiapkan fasilitasi perusahaan pemula berbasis teknologi di Daerah;
d. Menyiapkan pelaksanaan kemitraan global dan kemitraan industri di Daerah;
e. Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan sistem audit teknologi di Daerah;
f. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah;
g. Menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi

1. Tugas Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi bertugas menyiapkan rencana kerja, koordinasi dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta kerjasama di bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi.
2. Fungsi
   a. Penyiapan rencana kerja, koordinasi dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang SDM IPTEK;

b. Penyiapan rencana kerja, koordinasi dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dalam pelaksanaan Fungsi

Tugas dalam pelaksanaan fungsi SDM IPTEK meliputi:

a. Menyiapkan kebijakan pengembangan SDM IPTEK, antara lain pengembangan kompetensi, pengembangan talenta, serta pengawasan dan pengendalian SDM IPTEK di Daerah;
b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM IPTEK, meliputi pengembangan kompetensi dan pengembangan talenta SDM IPTEK di Daerah;
c. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM IPTEK di Daerah;
d. Menyiapkan pelaksanaan pengembangan profesi SDM IPTEK di Daerah;
e. Menyiapkan pelaksanaan manajemen talenta SDM IPTEK di Daerah;
f. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian SDM IPTEK;
g. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pembinaan SDM IPTEK di Daerah;
h. Menyiapkan evaluasi, monitoring dan pelaporan pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pembinaan SDM IPTEK di Daerah; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dalam pelaksanaan fungsi Infrastruktur Riset dan Inovasi meliputi:

a. Menyiapkan kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
c. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan Infrastruktur Riset dan Inovasi, antara lain kawasan sains dan teknologi, kebun raya dan koleksi ilmiah, laboratorium dan fasilitasi riset di Daerah;
d. Menyiapkan fasilitasi dan pembinaan Infrastruktur Riset dan Inovasi pemerintah kabupaten/kota, Perguruan Tinggi dan masyarakat di Daerah;
e. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan optimalisasi Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
f. Menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BRIDA ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
5. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya BRIDA Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) bidang. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 61 orang terdiri dari PNS sejumlah 39 Orang dan PPPK sejumlah 22 Orang (Per Desember Tahun 2024) yang terdiri dari:

Tabel 2.1

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
I	-	-	-
II	2	-	2
III	8	15	23
IV	11	3	14
PPPK	17	5	22
JUMLAH	**38**	**23**	**61**

Sumber: BRIDA Provinsi Jawa Tengah September Tahun 2025

Tabel 2.2

Jumlah ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
SMA	8	2	10
DIII	1	1	2
STRATA 1	18	10	28
STRATA 2	7	9	16
STRATA 3	2	1	3
JUMLAH	**38**	**23**	**61**

Sumber : BRIDA Provinsi Jawa Tengah (Per September Tahun 2025)

Berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai yang ada pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berpendidikan S3 sejumlah 3 (tiga) orang S2 sejumlah 16 (enam belas) orang, yang berpendidikan S1 sejumlah 28 orang, yang berpendidikan DIII sejumlah 2 (dua) orang, dan yang berpendidikan SMA sejumlah 10 (sepuluh) orang.

Tabel 2.3
Jumlah PNS BRIDA Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
<20-40 Tahun	29
41 - 55 Tahun	27
> 55 Tahun	5
Jumlah	**61**

Sumber: BRIDA Provinsi Jawa Tengah (Per September Tahun 2025)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum sumberdaya manusia yang dimiliki BRIDA Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh laki-laki dengan tingkat pendidikan rata rata strata 1 serta dalam rentang usia muda antara 20-40 tahun, hal ini menjadikan BRIDA Provinsi Jawa Tengah perpotensi untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang inovatif dan akselerasi dalam pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatannya.

Sesuai dengan proyeksi terhadap peta jabatan yang ada maka kebutuhan ideal pegawai di BRIDA adalah sejumlah 219 Orang dengan kualifikasi jabatan dominan di kualifikasi fungsional peneliti dan perekayasa berpendidikan S2 dan S3; serta fungsional Analis Kebijakan, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertahap sesuai kebutuhaan, Namun pemenuhannya disesuaikan

dengan ketersediaan sumberdaya yang lainnya juga, antara lain ketersediaan Gedung kerja, sarpras dan anggaran.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jl. Imam Bonjol No. 190 Semarang, dengan kelengkapan Sarana dan prasarana kerja (perlengkapan) yang masih dikelola dan tercatat sampai dengan kondisi per bulan September tahun 2025 terdiri:

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana BRIDA Provinsi Jawa Tengah

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah/ Kapasitas	Satuan
1.	Gedung Kantor	4	unit
2.	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	9	unit
3.	Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)	2	unit
4.	Peralatan Kantor		
	a. Laptop	16	unit
	b. Notebook	3	unit
	c. Komputer PC	38	unit
	d. Komputer All In One	23	unit
	e. Printer	58	unit
	f. LCD Projektor	7	unit
	g. Sound system	3	paket
	h. CCTV	31	paket
	i. AC	63	unit
	j. Genset	1	unit

Sumber: BRIDA Provinsi Jawa Tengah (Per September Tahun 2025)

Dari tabel 2.5 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Gedung kantor sebanyak 3 (tiga) tempat yaitu Kantor Induk di Jl. Imam Bonjol No. 190 Semarang. terdiri dari : a). Bangunan Gedung Kantor Induk; b). Bangunan Gedung Inwinov; c). Bangunan Tempat Parkir dan Ruang Tenaga Keamanan.
2. Kendaraan dinas sebanyak 11 (sebelas) unit terdiri dari 9 (sembilan) unit kendaraan dinas roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua.
3. Peralatan kantor yang mendukung kinerja pelayanan Penelitian dan Pengembangan terdiri : 16 unit laptop, 54 unit komputer, 58 unit printer, 30 unit UPS, 7 unit LCD, 3 unit sound system, 30 set unit CCTV, 1 unit PABX, 1 unit *finger print*, 25 buah pesawat telepon, 63 unit AC, 1 unit genset.

Sarana dan prasaran yang dimiliki BRIDA Provinsi Jawa Tengah masih cukup memadai, namun untuk mengikuti perkembangan yang ada diperlukan pembaharuan terhadap beberapa sarana prasarana yang secara usia pemakaian sudah banyak mengalami penyusutan, antara lain kendaraan roda empat untuk operasional dengan usia lebih dari 20 (dua

puluh) tahun dan sarana prasarana IT mendukung pengembangan system informasi layanan Penelitian dan Pengembangan. Pengembangan terhadap Gedung kantor yang representatif sangat dibutuhkan, sehingga pemindahan Gedung kantor ke lokasi yang lebih representatif dan dapat dikembangkan dari luasan lahan dan besaran gedung kerja sesuai dengan kebutuhan jumlah pegawai memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan kerja yang lebih representatif dan nyaman untuk bekerja, selain itu juga Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi.

Infrastruktur riset dan inovasi memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah. Riset dan inovasi di daerah membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendorong kolaborasi dan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, peneliti, industri, pemerintah, dan masyarakat dalam memajukan ekosistem riset dan inovasi. Peningkatan infrastruktur riset dan inovasi baik yang dikelola pemerintah daerah, swasta dan perguruan tinggi diperlukan untuk mendukung penguatan riset dan inovasi di Jawa Tengah. BRIDA Provisi Tengah menginisiasi terbentuknya Kawasan Sains Teknologi di masa yang akan datang dimana saat ini masih pada tahap pengalihan pengelolaan lahan yang sebelumnya di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ke BRIDA Provinsi Jawa Tengah di daerah Batursari, Mranggen, Kab Demak yang secara bertahap akan di fungsikan sebagai Kawasan Sains Teknologi dimaksud.

Selain itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang riset dan inovasi untuk menghasilkan hasil riset yang lebih berkualitas. Tantangan lainnya terkait perlunya ketersediaan dan integrasi data riset dan inovasi. Saat ini basis data riset dan inovasi masih tersebar di berbagai lembaga atau satuan kerja dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan kebijakan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk peningkatan infrastruktur riset dan inovasi juga masih perlu diperkuat. Meskipun telah ada beberapa inisiatif kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah, namun banyak dari kolaborasi ini belum terpetakan dengan baik atau belum dilakukan secara berkelanjutan. Tanpa adanya sistem yang mendukung interaksi dan kolaborasi yang lebih erat, potensi untuk menciptakan inovasi yang dapat memecahkan masalah masalah daerah menjadi terbatas.

Infrastruktur IPTEK lainnya adalah kebun raya yang salah satunya memegang fungsi riset dan inovasi, serta edukasi. Di Jawa Tengah pada saat ini terdapat 5 kebun raya, baik yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten/kota. Kebun raya daerah baik provinsi

maupun kabupaten/ kota belum dikelola secara maksimal sesuai kebutuhan (konservasi, penelitian dan pendidikan serta rekreasi).

Sesuai amanat Perpres Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya di Indonesia, Pengelolaan Kebun Raya Baturaden di Banyumas yang menjadi Kewenangan Provinsi diamanahkan untuk dilakukan pengalihan dari sebelumnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah kepada BRIDA Provinsi Jawa Tengah. Sampai Saat ini proses pengalihannya masih pada tahap Penyusunan draft Peraturan Gubernur tentang Tugas pokok dan fungsi OPD di Biro Organisasi dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya masih akan melalui tahap evaluasi dan persetujuan Kemendagri.

2.3 Kinerja Pelayanan BRIDA Provinsi Jawa Tengah

Gambaran kinerja BRIDA sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun Ke-	
						2023	2024	2023	2024	2023	2024
A	**Tujuan PD**										
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	-	-	-	NA	70,1	NA	73,41	NA	104,72
2	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	-	-	-	71	72,5	65,40	72,85	92,11	100,48
B	**Sasaran PD**										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-	85	84	85	92,75	100,00	110,42
2	Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	-	-	NA	2,91	NA	2,55	NA	87,63
3	Persentase riset dan inovasi daerah yang diterapkan	%	-	-	-	100	100	100	100	100,00	100,00
C	**Program**										
1	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	100	100	100	100	100,00	100,00
2	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	-	-	-	100	100	100	100	100,00	100,00
3	Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	%	-	-	-	NA	100	NA	100	NA	100,00
4	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	%	-	-	-	NA	100	NA	100	NA	100,00
5	Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	%	-	-	-	NA	100	NA	100	NA	100,00
6	Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	%	-	-	-	NA	100	NA	100	NA	100,00

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

No.	Uraian	Pagu Indikatif (Rp.000)		APBD pada Tahun (Rp.000)		Realisasi Anggaran Tahun sampai dengan Tahun (Rp. 000)		Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke - (%)		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran (Rp. 000)	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja	23.637.000	28.089.228	12.640.396	19.971.483	12.081.715	19.160.185	96	95,93	7.078.470	- 3,5
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya Tahun 2023-2024, yaitu dari hasil pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan sebagaimana tersebut pada kedua tabel di atas terlihat bahwa peningkatan kualitas pelayanan Penelitian dan Pengembangan masih memerlukan perhatian untuk ditingkatkan. Dukungan sarana prasarana ke depan sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kualitas pelayanan Penelitian dan Pengembangan yang lebih baik.

Selain itu dapat diketahui gambaran potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan yang ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya. Untuk realisasi anggaran BRIDA Provinsi Jawa Tengah selalu dilakukan upaya perbaikan, dengan optimalisasi pengendalian kegiatan dan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

Kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai regulasi yang berlaku di bidang Penelitian dan Pengembangan sangat dipengaruhi oleh banyak kebijakan khususnya kebijakan di tingkat pusat (BRIN), antara lain optimalisasi dan pemanfaatan infrastrukur riset dan inovasi dan integrasi data Penelitian dan Pengembangan pusat dan daerah. Namun secara umum, efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja pelayanan BRIDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2023-2024 sudah baik.

2.4 Permasalahan Pelayanan

Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang riset dan inovasi pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Terdapat beberapa permasalahan di bidang riset dan inovasi, pemetaan permasalahan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat melalui tabel 3.1. berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya Budaya Riset dan Inovasi Daerah	Kurangnya Pengarusutamaan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Pengkajian untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah
			2. Tema Kajian kurang relevand dengan kebutuhan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
			3. Masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dengan kebutuhan Pemerintah daerah
			4. Belum Optimalnya hasil riset dan inovasi untuk penanganan permasalahan dan kebutuhan di daerah.
			5. Terbatasnya Kolaborasi Pelaksanaan Riset dan Inovasi yang sesuai dengan issue daerah
			6. Masih kurangnya koordinasi untuk membangun kolaborasi pelaksanaanriset dan inovasi
		Kurang Kuatnya Ekosistem Riset dan Inovasi	1. Belum optimalnya hilirasi Hasil Inovasi
			2. Terbatasnya fasilitasi inovasi masyarakat
			3. Masih Kurangnya Keberlanjutan Inovasi Masyarakat
			4. Belum optimalnya Pengembangan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah
			5. Terbatasnya Pemetaan Kondisi SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah
			6. Masih kurangnya Informasi Database SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi

2.5 Isu Strategis

Visi Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045” Dengan misi:

1) Meningkatkan layanan dasar yang Inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;
2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;
3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadan, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan
6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan tahapan pertama dari implementasi RPJPD Tahun 2025-2045. Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah diarahkan pada tema “Penguatan Landasan Transformasi”. Tahap pertama ini diarahkan pada kebijakan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah yang didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

Transformasi sosial diarahkan pada peningkatan perluasan layanan pendidikan bermutu berorientasi pada

demand-supply side dan penguatan kelembagaan, penuntasan layanan kesehatan dasar sesuai standar, serta penguatan tata kelola dan perluasan cakupan penyelenggaraan perlindungan sosial.

Transformasi ekonomi diarahkan pada inisiasi penerapan ekonomi hijau, penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, peningkatan kemandirian desa didukung dengan penguatan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi.

Transformasi tata kelola diarahkan pada penataan regulasi, manajemen organisasi serta proses bisnis yang efektif dan efisien berbasis manajemen risiko dan kebutuhan daerah, peningkatan kualitas dan integritas penyelenggara pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pelayanan publik, transformasi dalam upaya pembentukan masyarakat digital, peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder terkait.

Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya penguatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menciptakan wilayah yang kondusif, peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat, pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, diantaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil, pemenuhan hak asasi manusia, serta stabilitas ekonomi makro daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada penguatan karakter masyarakat Jawa Tengah dengan memperkuat landasan strategi pemajuan kebudayaan yang berorientasi pada perlindungan dan pengembangan, internalisasi budaya dalam pendidikan lokal bersentral pada perlindungan dan pembinaan, pengejawantahan nilai agama dan budaya dalam

pendidikan karakter, mengedepankan habituasi dimulai dalam lingkup keluarga maupun satuan pendidikan formal maupun nonformal, landasan kohesi sosial dengan menempatkan organisasi dan komunitas agama, sosial masyarakat sebagai kolaborator. Pada tahap ini pembangunan keluarga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang peran dan fungsi keluarga dalam mencegah terjadinya perilaku salah dan ketidaksetaraan dalam keluarga, membentuk karakter masyarakat, serta menghadapi ancaman lingkungan termasuk ancaman bencana. Tahap ini juga diarahkan pada peningkatan kinerja jasa lingkungan melalui pembenahan tata kelola lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan dan kehati, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyediaan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim serta penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana.

Pembangunan kewilayahan disertai sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada peningkatan pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, peningkatan pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, peningkatan fasilitas keselamatan, pengguna angkutan umum, dan kualitas simpul transportasi serta konektivitas jaringan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan, penguatan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, peningkatan penyediaan rumah layak huni, serta perbaikan kawasan permukiman, didukung dengan percepatan penyusunan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR)), penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang, percepatan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta percepatan pelaksanaan reforma agraria. Pembiayaan pembangunan, diarahkan pada upaya penguatan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah.

Tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung kepada upaya pencapaian visi, misi, serta program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode kepemimpinan Tahun 2025 - 2029 yaitu pada Sasaran Pembangunan Daerah 2 yaitu Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan, pada sub Penguatan riset dan Inovasi yang meliputi:

1. Penguatan peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, serta perguruan tinggi, mitra pemerintah;
2. Penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sector;
3. Penguatan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi,
4. Penguatan relevansi dan produktivitas hasil riset dan inovasi di semua sektor pembangunan;
5. Penguatan kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah, serta
6. Penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Tabel 3.1), terdapat faktor- faktor penghambat dalam upaya pengembangan riset dan inovasi yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Namun demikian, kondisi saat ini riset dan inovasi belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Beberapa penyebabnya antara lain belum optimalnya peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor, tata kelola kelembagaan riset dan inovasi, pemanfaatan hasil riset dan inovasi di semua sektor, kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah, inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

Adapun isu strategis yang berhasil dirumuskan di bidang riset dan inovasi antara lain:

1. Kemajuan teknologi masih menjadi domain dari negara maju, posisi Indonesia hanya sebagai pengguna penerapan teknologi;
2. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi sehingga membutuhkan lebih banyak inovasi dalam penciptaan kesempatan kerja;
3. Pertumbuhan pusat perekonomian relatif stagnan;
4. Didominasi oleh industri padat karya;
5. Ancaman bencana alam yang cukup tinggi.

Sasaran terhadap Renstra Kementrian/Lembaga di maksudkan untuk menilai keselarasan, keterpaduan dan sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra BRIDA Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra Kementrian/ Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi wewenang, tugas dan fungsinya masing masing. Adapun Renstra dari Badan Riset dan Inovasi Nasional memuat Visi BRIN 2020 - 2024 sebagai berikut: “Terwujudnya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Badan Riset dan Inovasi Nasional pada 2022-2024 adalah:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana riset dan inovasi penyelenggaraan ketenaganukliran, dan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi BRIDA;

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.

Sejalan dengan Visi dan Misi BRIN, BRIDA juga diharapkan dapat memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Gubernur dan Wakil Gubenur dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi.

Uraian tujuan dalam Renstra BRIDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi dan misi BRIN. Dari telaah Renstra OPD lingkup riset dan inovasi Kabupaten/Kota, penguatan koordinasi menjadi penting untuk dilakukan mengingat fungsi fasilitasi provinsi dalam beberapa ruang lingkup pelayanan riset dan inovasi masih menghadapi kendala dalam implementasinya, antara lain kurangnya SDM dan infastruktur, Disamping tersebut di atas, secara umum saat Renstra BRIDA Provinsi Jawa Tengah ini disusun, dokumen Renstra Kabupaten/Kota belum ada yang menyusun sehingga menjadi prioritas BRIDA Provinsi Jawa Tengah untuk membantu memberikan advokasi kepada Kabupaten/Kota untuk Menyusun renstra kab /kota.

Telaahan RTRW dan KLHS

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk melihat faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian target pelayanan yang ditetapkan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penelaahan RTRW untuk menjamin agar sasaran dan arah kebijakan dalam Renstra selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW, dan bersamaan juga dilakukan penelaahan KLHS untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan Renstra.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur ruang wilayah Provinsi serta penetapan kawasan strategis Provinsi. Dalam kebijakan pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah senantiasa memperhatikan faktor-faktor potensi daerah yang ada untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana tata ruang wilayah merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis provinsi tapi untuk urusan penunjang penelitian dan pengembangan, BRIDA tidak berkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah.

Implikasi KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan salah satu instrumen memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan berintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan tidak berkaitan langsung dengan KLHS.

Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan riset dan inovasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dirumuskan menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan bidang riset dan inovasi di masa yang akan datang, antara lain:

1. Peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, serta perguruan tinggi, mitra pemerintah;
2. Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi sesuai kualifikasi dan kompetensi di semua sector;
3. Tata kelola kelembagaan riset dan inovasi,
4. Relevansi dan produktivitas hasil riset dan inovasi di semua sektor pembangunan;
5. Kerja sama riset dan inovasi antar pelaku usaha, swasta, dan pemerintah, serta.
6. Inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

Tabel 2.8
Perumusan Isu Strategis BRIDA Jateng

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Jawa Tengah didominasi oleh Lahan Pertanian; 2. Jumlah Penduduk didominasi umur generasi milenial; 3. Posisi geografis dan strategis diapit oleh provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Yogyakarta; 4. Adanya dukungan regulasi dan dukungan instansi Pembina BRIN 5. Adanya kelompok masyarakat inovatif hasil dari Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat; 6. Potensi invenstasi yang dominan di Jawa Tengah; 8. Lembaga Perguruan Tinggi di Jawa Tengah dapat menjadi mitra riset dan inovasi; 9. Adanya perusahaan/swasta di Jawa Tengah yang dapat menjadi mitra	1. Butuh banyak inovasi terapan untuk percepatan pembangunan perekonomian daerah; 2. Kolaborasi dan Sinergitas dengan Lembaga Litbang di Jawa Tengah; 3. Riset dan Inovasi belum menjadi prioritas kebijakan anggaran di Daerah; 4. Tingginya ego sektoral sehingga akses pemanfaatan data sektoral belum optimal 5. Budaya hidup masyarakat belum mudah untuk menerima perubahan yang dihasilkan dari sebuah inovasi; 6. Dukungan pemerintah Pusat yang belum optimal untuk kemandirian pengembangan	-	1. Kemiskinan 2. Pangan dan gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman 11. Perubahan iklim 12. Sumber daya kelautan 13. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 14. Kemitraan global	1. Industri 2. Ekonomi Biru 3. Ekonomi Kreatif 4. Produktivitas Tenaga Kerja 5. Pertanian 6. UMKM Koperasi 7. Digitalisasi	1. Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal 2. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor- sektor unggulan 3. Rendahnya daya saing tenaga kerja Belum optimalnya riset dan inovasi 4. Ketimpangan ekonomi antar wilayah 5. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	1. Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sector; 2. Tata kelola kelembagaan riset dan inovasi 3. Relevansi dan produktivitas hasil riset dan inovasi di semua sektor pembangunan; 4. Kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah, serta 5. Inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi

riset dan inovasi; 10. Sinergitas dan kolaborasi BRIDA dengan kalangan Dunia Pendidikan, Dunia Usaha melalui CSR, masyarakat komunitas kreatif inovatif dan Media	IPTEKIN di Daerah; 7. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah belum memanfaatkan secara optimal rekomendasi hasil riset dan inovasi;					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BRIDA Provinsi Jawa Tengah

3.1.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Pada Tahun 2023, terbit Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan Fungsi BRIDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan mengadopsi dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini sasaran yang terkait dengan bidang riset dan inovasi maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan **“Meningkatkan Budaya Kreatif dan inovatif** dengan indikator tujuannya yaitu Nilai Kapabilitas Inovasi.

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable Relevant, Time Bond dan Continously Improve* (SMART-C). Sasaran Renstra menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dari Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam menetapkan tujuan dan sasaran Renstra 5 (lima) tahun ke depan mengacu kepada visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, dengan Misi Pembangunan daerah:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dilaksanakan dengan tiga fokus kerja yaitu:

1. JATENG SIGAP!

   Merupakan upaya Pemerintah dalam menghadrikan Pemerintahan yang Responsif dalam menjawab kebutuhan Masyarakat Jawa Tengah. Melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang dapat diwujudkan dengan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat.

2. JATENG MAKMUR!

   Merupakan langkah Pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah melalui Transformasi Ekonomi yang tidak hanya berfokus pada Perekonomian Perkotaan juga Pedesaan, Perencanaan Tata Ruang yang responsif, dengan mengoptimalkan Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif serta dukungan Iklim Investasi.

3. JATENG NYAMAN!

   Menjadi komitmen Pemerintah dalam menghadirkan Transformasi Sosial yang tercermin melalui terwujudnya Stabilitas, Kondusivitas, serta Kenyamanan dalam berkehidupan melalui peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif, pengembangan budaya lokal, aman dan nyaman dalam beribadah serta perlindungan terhadap HAM untuk Kualitas SDM Jawa Tengah yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta indikatornya kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BRIDA Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	*Baseline* Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatkan Budaya Kreatif dan Inovatif		Nilai Kapabilitas Inovasi	Angka	4,51	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69	4,70	4,70
		Meningkatnya kualitas riset dan inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Angka	65,40	72,85	73	73,5	74	74,5	75	75,5	75,5
		Meningkatnya Kebermanfaatan penelitian	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk tujuan sasaran, serta inidikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Serta Indikator yang Berkaitan dengan Kesekretariatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi diperangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	NA	73,41	73,50	73,75	74	74,25	74,50	74,75	74,75
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	NA	92,75	85	86	87	88	89	90	90
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	NA	2,55	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	2,85

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.2.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan dalam memanajemen setiap program kegiatan sebagai sebuah kesatuan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang memiliki.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dalam pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang dikembangkan dengan prinsip untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment pengguna layanan dan pemangku kepentingan, bernilai tambah dan berkelanjutan, dengan tahapan penentuannya yang meliputi:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan dan isu-isu strategis;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*);
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran.

Strategi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi meliputi:

a. Peningkatan kualitas Riset dan Inovasi yang aplikatif;
b. Penguatan Sinergi, Koordinasi dan kerjasama riset dan inovasi dengan stakeholder;

c. Hilirisasi inovasi teknologi dalam mendukung pembangunan daerah;
d. Penjaringan hasil riset dan inovasi di Jawa Tengah;
e. Meningkatkan potensi akses pembiayaan riset dan inovasi di luar APBD;
f. Menemukenali potensi hasil riset dan inovasi di Jawa Tengah untuk didokumentasikan dan disosialisasikan ke masyarakat;

3.2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan berguna untuk menjamin ketercapaian, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang memberikan arahan dan panduan hasil rumusan strategi yang dipilih agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun mendukung pencapaian sasaran RPJMD berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dengan memperhitungkan dan antisipasi terhadap semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul.

Melalui strategi dan arah kebijakan maka akan terumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi Gubernur dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan di bidang riset dan inovasi. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025-2029 mendasarkan kepada tujuan dan sasaran organisasi serta analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur

peluang dan ancaman yang akan dihadapi dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari sumberdaya yang dimiliki, merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1.

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan budaya kreatif dan inovatif	1.1 Meningkatnya kualitas riset dan inovasi	1.1.1 Penguatan Fasilitasi dan Hilirisasi Riset dan Inovasi	1.1.1.1 Optimalisasi Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi 1.1.1.2 Apresiasi prestasi inovasi dan pembinaan Inventor
		1.1.2 Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	1.1.2.1 Pengembangan SDM IPTEK serta Infrastruktur Riset dan Inovasi 1.1.2.2 Pembinaan kompetensi dan talenta SDM IPTEK serta Infrastruktur Riset dan Inovasi
	1.2 Meningkatnya Kebermanfaatan penelitian	1.2.1 Penguatan Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	1.2.1.1 Penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip perencanaan pembangunan Daerah 1.2.1.2 Pelaksanaan kajian permasalahan dan isu strategis Daerah
		1.2.2 Peningkatan Kolaborasi Pelaksanaan Riset dan Inovasi	1.2.2.1 Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Riset dan Inovasi 1.2.2.2 Penyusunan Database Riset dan Inovasi yang berkualitas
2. Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi diperangkat daerah	2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	2.1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.1.1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.1.1.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

			2.1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		2.1.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.1.2.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2.1.2.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2.1.3.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.1.3.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.1.3.4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 2.1.4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.1.4.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.1.4.10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

		2.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.1.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.1.5.3 Pengadaan Mebel 2.1.5.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.1.5.5 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2.1.5.6 Pengadaan Aset Tak Berwujud 2.1.5.7 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.1.5.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.1.5.9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		2.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		2.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.1.7.3 Pemeliharaan Mebel

			2.1.7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.1.7.5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 2.1.7.6 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 2.1.7.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.1.7.8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya 2.1.7.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Perangkat Daerah	2.2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.2.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.2.1.3 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Prioritas dalam setiap tahapan harus mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan sebelumnya. Pentahapan Renstra dimaksud disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra
BRIDA Provinsi Jawa Tengah

Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
1	2	3	4	5
Penguatan Database Riset dan Inovasi di dukung Sumberdaya riset dan inovasi yang memadai	Implementasi Digitalisasi Informasi Riset dan Inovasi serta Pemanfaatannya didukung Sumberdaya riset dan inovasi yang memadai	Penguatan Hub Ekosistem Riset dan Inovasi Berbasis Digital didukung Sumberdaya riset dan inovasi yang memadai	Penguatan Budaya Riset dan Inovasi Unggul Berbasis Digital didukung Sumberdaya riset dan inovasi yang memadai	Terwujudnya Transformasi Riset dan Inovasi berbasis Digital Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah didukung Sumberdaya riset dan inovasi yang memadai

3.3 Manajemen Resiko Strategis

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap
Risiko Strategis BRIDA Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 – 2029

NO	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	PJ	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Kurangnya hilirisasi hasil riset	12	Kurangnya kesadaran dan apresiasai terhadap inovasi	Ekosistem inovasi menjadi lemah	Pelaporan Indeks Inovasi, Diseminasi Inovasi	Kepala BRIDA	2030
2	Meningkatnya Kebermanfaatan penelitian	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Lemahnya Pemanfaatan Hasil Pengkajian untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	12	Regulasi yang kurang mendukung hilirisasi hasil riset	Berkurangnya Pengarusutamaan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Mengoptimalkan Forum komunikasi riset dan inovasi serta pemberian Anugerah Riset	Kepala BRIDA	2030

3	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sumberdaya (SDM, Sarpras) Riset dan Inovasi kurang memadai	12	Kurangnya penyediaan sumberdaya (SDM, Sarpras) Riset dan Inovasi	Belum semua penyelenggaraan Pelayanan urusan riset dan inovasi dilaksanakan dengan optimal	Penyediaan SDM dan sarpras (gedung kantor, peralatan, perlengkapan) riset dan inovasi secara bertahap	Kepala BRIDA Provinsi Jawa Tengah	2030
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Identifikasi risiko kurang mendalam serta komperenhensif	16	belum semua SDM memahami dan tahu tentang pengelolaan Manajemen Risiko	terdapat banyak risiko yang tidak teridentifikasi	melakukan sosialisasi ke internal BRIDA dan melakukan bimtek	Kepala BRIDA Provinsi Jawa Tengah	2030

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu sebagai bagian dari instrumen arah kebijakan, yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Perumusan program merupakan tindak lanjut dari rumusan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan dalam organisasi Perangkat Daerah. Program/kegiatan disusun melalui analisis perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta penganggarannya, mendapatkan prioritas, karena memiliki pengaruh yang luas dan urgent untuk diselenggarakannya.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program, yang mengakomodasi perkembangan permasalahan pembangunan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029, pada awal tahun pelaksanaan Renstra memiliki 2 program, dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan. Yang merupakan program strategis hanya 1 yaitu Program Riset dan Inovasi sedangkan 1 program yang lain merupakan program operasional atau penunjang, yaitu program Program Penunjang Urusan Daerah

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
BRIDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lok
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan budaya kreatif dan inovatif								6.400.000.000		6.790.000.000		6.905.000.000		7.300.000.000		7.500.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
				Kapabilitas Inovasi	Angka	4,64	4,66		4,67		4,68		4,69		4,7		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi							1.735.000.000		1.800.000.000		1.830.000.000		1.960.000.000		2.010.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
				Indeks Inovasi Daerah	Angka	72,85	73,5	1.735.000.000	74	1.800.000.000	74,5	1.830.000.000	75	1.960.000.000	75,5	2.010.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						1.735.000.000		1.800.000.000		1.830.000.000		1.960.000.000		2.010.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	
			Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah	%	100	100	1.735.000.000	100	1.800.000.000	100	1.830.000.000	100	1.960.000.000	100	2.010.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	

		KEGIATAN Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						950.000.000		975.000.000		1.000.000.000		1.090.000.000		1.130.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen	N/A	1	550.000.000	1	550.000.000	1	565.000.000	1	605.000.000	1	615.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	
		SUB KEGIATAN Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						550.000.000		550.000.000		565.000.000		605.000.000		615.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen	N/A	1	550.000.000	1	550.000.000	1	565.000.000	1	605.000.000	1	615.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	35 Kab./Kota, JAWA TENGAH/ Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi
			Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	N/A	1	400.000.000	1	425.000.000	1	435.000.000	1	485.000.000	1	515.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	

		SUB KEGIATAN Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						400.000.000		425.000.000		435.000.000		485.000.000		515.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	N/A	1	400.000.000	1	425.000.000	1	435.000.000	1	485.000.000	1	515.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi/ KOTA SEMARANG
		KEGIATAN Invensi dan Inovasi						785.000.000		825.000.000		830.000.000		870.000.000		880.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Laporan	N/A	1	785.000.000	1	825.000.000	1	830.000.000	1	870.000.000	1	880.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	
		SUB KEGIATAN Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi						785.000.000		825.000.000		830.000.000		870.000.000		880.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Laporan	N/A	1	785.000.000	1	825.000.000	1	830.000.000	1	870.000.000	1	880.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi/ KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kebermanfaatan penelitian							4.665.000.000		4.990.000.000		5.075.000.000		5.340.000.000		5.490.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

				Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	%	100	100	4.665.000.000	100	4.990.000.000	100	5.075.000.000	100	5.340.000.000	100	5.490.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						1.790.000.000		1.925.000.000		1.955.000.000		2.085.000.000		2.135.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	
			Pelaksanaan riset (meliputi idea concep paper,pra survey, penyusunan riset desain, pengambilan data di masyarakat dan OPD, analisis data, penyusunan laporan akhir) dan Uji Coba Penerapan Inovasi	Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	100	1.790.000.000	100	1.925.000.000	100	1.955.000.000	100	2.085.000.000	100	2.135.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	
		KEGIATAN Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						800.000.000		850.000.000		865.000.000		930.000.000		955.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	N/A	1	800.000.000	1	850.000.000	1	865.000.000	1	930.000.000	1	955.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	
		SUB KEGIATAN Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						800.000.000		850.000.000		865.000.000		930.000.000		955.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	

			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	1	1	800.000.000	1	850.000.000	1	865.000.000	1	930.000.000	1	955.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	35 Kab./Kota, JAWA TENGAH/ Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi
		KEGIATAN Invensi dan Inovasi						990.000.000		1.075.000.000		1.090.000.000		1.155.000.000		1.180.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Laporan	N/A	1	990.000.000	1	1.075.000.000	1	1.090.000.000	1	1.155.000.000	1	1.180.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	
		SUB KEGIATAN Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi						990.000.000		1.075.000.000		1.090.000.000		1.155.000.000		1.180.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Laporan	1	1	990.000.000	1	1.075.000.000	1	1.090.000.000	1	1.155.000.000	1	1.180.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	35 Kab./Kota, JAWA TENGAH/ Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						1.775.000.000		1.875.000.000		1.905.000.000		1.985.000.000		2.035.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	
			Seminar Riset, Fasilitasi Kekayaan Intelektual; Pelaksnaan Krenova dan Promosi inovasi teknologi	Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	100	1.775.000.000	100	1.875.000.000	100	1.905.000.000	100	1.985.000.000	100	2.035.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	

		KEGIATAN Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						200.000.000		210.000.000		215.000.000		240.000.000		250.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	N/A	1	200.000.000	1	210.000.000	1	215.000.000	1	240.000.000	1	250.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	
		SUB KEGIATAN Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						200.000.000		210.000.000		215.000.000		240.000.000		250.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	1	1	200.000.000	1	210.000.000	1	215.000.000	1	240.000.000	1	250.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	35 Kab./Kota, JAWA TENGAH/ Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi
		KEGIATAN Invensi dan Inovasi						1.575.000.000		1.665.000.000		1.690.000.000		1.745.000.000		1.785.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	N/A	1	1.575.000.000	1	1.665.000.000	1	1.690.000.000	1	1.745.000.000	1	1.785.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	
		SUB KEGIATAN Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						615.000.000		645.000.000		660.000.000		685.000.000		705.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	

			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	1	1	615.000.000	1	645.000.000	1	660.000.000	1	685.000.000	1	705.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	35 Kab./Kota, JAWA TENGAH/ Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi
		SUB KEGIATAN Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi						655.000.000		705.000.000		715.000.000		720.000.000		730.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan	1	1	655.000.000	1	705.000.000	1	715.000.000	1	720.000.000	1	730.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	35 Kab./Kota, JAWA TENGAH/ Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi
		SUB KEGIATAN Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						305.000.000		315.000.000		315.000.000		340.000.000		350.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan	1	1	305.000.000	1	315.000.000	1	315.000.000	1	340.000.000	1	350.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	35 Kab./Kota, JAWA TENGAH/ Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						1.100.000.000		1.190.000.000		1.215.000.000		1.270.000.000		1.320.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	

			Pengembanan Profesi, Kompetensi dan Talenta SDM; Fasilitrasi dan Koordinasi Kawasan Riset, Sains dan Teknologi serta optimalisasi Fungsi Kebun Raya	Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan	%	100	100	1.100.000.000	100	1.190.000.000	100	1.215.000.000	100	1.270.000.000	100	1.320.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	
		KEGIATAN Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						500.000.000		520.000.000		530.000.000		555.000.000		580.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan	N/A	1	500.000.000	1	520.000.000	1	530.000.000	1	555.000.000	1	580.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	
		SUB KEGIATAN Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengemban						500.000.000		520.000.000		530.000.000		555.000.000		580.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	

		gan, pengkajian, dan penerapan															
			Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan	1	1	500.000.000	1	520.000.000	1	530.000.000	1	555.000.000	1	580.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	35 Kab./Kota, JAWA TENGAH/ Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi
		KEGIATAN Invensi dan Inovasi						600.000.000		670.000.000		685.000.000		715.000.000		740.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Laporan	N/A	1	600.000.000	1	670.000.000	1	685.000.000	1	715.000.000	1	740.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	
		SUB KEGIATAN Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan						450.000.000		510.000.000		525.000.000		530.000.000		545.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	

		infrastruktur dasar Riset dan Inovasi															
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Laporan	N/A	1	450.000.000	1	510.000.000	1	525.000.000	1	530.000.000	1	545.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi/ JAWA TENGAH
		SUB KEGIATAN Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah						150.000.000		160.000.000		160.000.000		185.000.000		195.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Laporan	N/A	1	150.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	185.000.000	1	195.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	BANYUMAS/ Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi/ JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis								16.171.348.000		16.633.995.000		16.045.716.000		17.898.648.000		18.152.598.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	73,41	73,75		74		74,25		74,5		74,75		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah							15.616.348.000		15.955.995.000		15.355.716.000		17.148.648.000		17.357.598.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	92,75	91,5	15.616.348.000	91,75	15.955.995.000	92	15.355.716.000	92,5	17.148.648.000	95,5	17.357.598.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						15.616.348.000		15.955.995.000		15.355.716.000		17.148.648.000		17.357.598.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

		DAERAH PROVINSI															
			Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	15.616.348.000	100	15.955.995.000	100	15.355.716.000	100	17.148.648.000	100	17.357.598.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		KEGIATAN 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.965.000.000		10.130.000.000		10.245.000.000		10.460.000.000		10.585.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatkan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	19	19	9.965.000.000	19	10.130.000.000	19	10.245.000.000	19	10.460.000.000	19	10.585.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.500.000.000		9.650.000.000		9.750.000.000		9.950.000.000		10.050.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45	55	9.500.000.000	60	9.650.000.000	66	9.750.000.000	70	9.950.000.000	75	10.050.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						225.000.000		230.000.000		235.000.000		230.000.000		235.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	225.000.000	12	230.000.000	12	235.000.000	12	230.000.000	12	235.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						120.000.000		125.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	120.000.000	12	125.000.000	12	130.000.000	12	140.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATANKoordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						120.000.000		125.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	12	120.000.000	12	125.000.000	12	130.000.000	12	140.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		KEGIATAN 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						383.348.000		127.995.000		139.000.000		150.000.000		166.950.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatkan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	2	383.348.000	2	127.995.000	2	139.000.000	2	150.000.000	2	166.950.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		SUB KEGIATAN Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						376.348.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	1	376.348.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						7.000.000		7.995.000		9.000.000		10.000.000		16.950.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	1	7.000.000	1	7.995.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	16.950.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		KEGIATAN 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						400.000.000		412.000.000		434.000.000		456.000.000		478.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatkan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100	400.000.000	100	412.000.000	100	434.000.000	100	456.000.000	100	478.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		SUB KEGIATAN Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						0		0		0		0		0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						290.000.000		300.000.000		310.000.000		320.000.000		330.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	290.000.000	1	300.000.000	1	310.000.000	1	320.000.000	1	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						90.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	45	90.000.000	50	90.000.000	55	100.000.000	60	110.000.000	65	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		28.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	30	20.000.000	30	22.000.000	30	24.000.000	30	26.000.000	30	28.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		KEGIATAN 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.059.000.000		1.108.000.000		1.160.716.000		1.205.648.000		1.244.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	1.059.000.000	100	1.108.000.000	100	1.160.716.000	100	1.205.648.000	100	1.244.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						23.000.000		26.000.000		29.000.000		32.000.000		35.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	23.000.000	1	26.000.000	1	29.000.000	1	32.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.000.000		50.000.000		58.716.000		60.000.000		65.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	45.000.000	1	50.000.000	1	58.716.000	1	60.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.000.000		6.000.000		8.000.000		10.000.000		15.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor						115.000.000		120.000.000		125.000.000		130.000.000		125.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	115.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		80.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						30.000.000		32.000.000		34.000.000		36.000.000		45.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	30.000.000	1	32.000.000	1	34.000.000	1	36.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi

		SUB KEGIATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu					45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					610.000.000		620.000.000		630.000.000		640.000.000		650.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	610.000.000	1	620.000.000	1	630.000.000	1	640.000.000	1	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					17.000.000		19.000.000		21.000.000		22.000.000		24.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	17.000.000	1	19.000.000	1	21.000.000	1	22.000.000	1	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.648.000		140.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.648.000	1	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi

		KEGIATAN 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					850.000.000		1.175.000.000		300.000.000		1.715.000.000		1.640.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Menyediakan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	36	42	850.000.000	44	1.175.000.000	46	300.000.000	48	1.715.000.000	50	1.640.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					250.000.000		0		0		0		0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	250.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Pengadaan Aset Tetap Lainnya					150.000.000		165.000.000		240.000.000		150.000.000		70.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	150.000.000	1	165.000.000	1	240.000.000	1	150.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Pengadaan Aset Tak Berwujud					0		0		0		0		0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi

		SUB KEGIATAN Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000		955.000.000		0		1.500.000.000		1.500.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	400.000.000	N/A	955.000.000	N/A	0	N/A	1.500.000.000	N/A	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		KEGIATAN 6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		0		0		0		0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		0		0		0		0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		KEGIATAN 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.706.000.000		1.727.000.000		1.753.000.000		1.780.000.000		1.805.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

			Menyediakan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1	1.706.000.000	1	1.727.000.000	1	1.753.000.000	1	1.780.000.000	1	1.805.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						585.000.000		590.000.000		600.000.000		610.000.000		620.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	585.000.000	1	590.000.000	1	600.000.000	1	610.000.000	1	620.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						315.000.000		325.000.000		335.000.000		345.000.000		355.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	315.000.000	1	325.000.000	1	335.000.000	1	345.000.000	1	355.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						800.000.000		805.000.000		810.000.000		816.000.000		820.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	800.000.000	1	805.000.000	1	810.000.000	1	816.000.000	1	820.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		KEGIATAN 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.253.000.000		1.276.000.000		1.324.000.000		1.382.000.000		1.438.648.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Menyediakan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1034	1034	1.253.000.000	1034	1.276.000.000	1034	1.324.000.000	1034	1.382.000.000	1034	1.438.648.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0		0		0		0		0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau						385.000.000		395.000.000		400.000.000		415.000.000		420.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

		Lapangan															
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	385.000.000	11	395.000.000	11	400.000.000	11	415.000.000	11	420.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Pemeliharaan Mebel						13.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		20.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	54	65	13.000.000	65	14.000.000	70	15.000.000	70	16.000.000	75	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0		0		0		0		0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						60.000.000		62.000.000		64.000.000		66.000.000		65.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	65	70	60.000.000	70	62.000.000	70	64.000.000	70	66.000.000	70	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						90.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1	90.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi

		SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					315.000.000		330.000.000		345.000.000		360.000.000		373.648.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	315.000.000	2	330.000.000	2	345.000.000	2	360.000.000	2	373.648.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					250.000.000		265.000.000		280.000.000		295.000.000		310.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	39	40	250.000.000	40	265.000.000	40	280.000.000	40	295.000.000	40	310.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					140.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		190.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	140.000.000	2	150.000.000	2	160.000.000	2	170.000.000	2	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH/ OPD Provinsi

	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah						555.000.000		678.000.000		690.000.000		750.000.000		795.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	2,55	2,65	555.000.000	2,7	678.000.000	2,75	690.000.000	2,8	750.000.000	2,85	795.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						555.000.000		678.000.000		690.000.000		750.000.000		795.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatkan kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	555.000.000	100	678.000.000	100	690.000.000	100	750.000.000	100	795.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						555.000.000		678.000.000		690.000.000		750.000.000		795.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	555.000.000	100	678.000.000	100	690.000.000	100	750.000.000	100	795.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		SUB KEGIATANPenyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						310.000.000		360.000.000		360.000.000		380.000.000		400.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	310.000.000	6	360.000.000	6	360.000.000	6	380.000.000	6	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG-OPD Provinsi

		SUB KEGIATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					170.000.000		228.000.000		230.000.000		245.000.000		265.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	12	170.000.000	12	228.000.000	12	230.000.000	12	245.000.000	12	265.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, JAWA TENGAH/ KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi
		SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					75.000.000		90.000.000		100.000.000		125.000.000		130.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	N/A	1	75.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG/ OPD Provinsi

Tabel 4.2
Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target / Volume	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalinnya Partisipasi berbasis Pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media)	Kerjasama dengan Akademisi: 1. Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI)	1 Kegiatan	Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan / Sub Kegiatan Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	Pemda (OPD Provinsi, Bapperida Kab/Kota) dan LPPM Perguruan Tinggi
		2. Riset Unggulan Daerah (RUD)	1 Kegiatan	Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan / Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Bidang Fasilitas dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Perguruan Tinggi
		3. Seminar Riset dan Inovasi	1 Kegiatan	Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan / Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Bidang Fasilitas dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	OPD Prov. Jateng, Pemda Kab/ Kota, dan Perguruan Tinggi
2	Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	1. Penyusunan Kajian/*policy brief*,	4 Dokumen	1. Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan / Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	1. Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	OPD Prov. Jateng dan Perguruan Tinggi
		2. Monev Implementasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ-PID),	1 Kegiatan	2. Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan / Sub Kegiatan Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	2. Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	OPD Prov. Jateng

		3. Penguatan Indeks Inovasi Daerah dan Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah,	1 Kegiatan	3. Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Invensi dan Inovasi/ Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	3. Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	OPD Prov. Jateng
		4. Anugerah Karya Riset Pembangunan,	1 Kegiatan	4. Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Invensi dan Inovasi/ Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	4. Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	Perguruan Tinggi, BRIN, Pemda kab/kota.
		5. DocRida (pemetaan hasil penelitian),	1 Kegiatan	5. Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Invensi dan Inovasi/ Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	5. Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	Perguruan Tinggi
		6. Pelaksanaan Penelitian,	2 Kegiatan	6. Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan / Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	6. Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	OPD Prov. Jateng, Pemda Kab/ Kota, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan stakeholder terkait lainnya
		7. Penyelenggaraan kreativitas inovasi masyarakat (KRENOVA) dan Penjaringan Inovasi Masyarakat (PIM),	1 Kegiatan	7. Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Invensi dan Inovasi / Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	7. Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	OPD Prov. Jateng, Pemda kab/ Kota, Perguruan Tinggi, Inventor/masyarakat

		8. Pameran Produk Inovasi,	1 Kegiatan	8. Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Invensi dan Inovasi / Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	8. Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	OPD Prov. Jateng, Pemda Kab/Kota, BUMN/BUMD, Swasta, Masyarakat
		9. Peningkatan kapasitas SDM IPTEK,	2 Kegiatan	9. Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan / Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	9. Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	BRIN, OPD Prov. Jateng, Pemda Kab/ Kota, Perguruan Tinggi,
		10. Pembinaan Infrastruktur Riset dan Inovasi	3 Kegiatan	10. Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Invensi dan Inovasi / Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	10. Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	Pemda Kab/ Kota, Pperguruan Tinggi,
3	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Fasilitasi Hak Cipta dan Paten Sederhana berbasis inovasi teknologi (bagi Pemenang KRENOVA)	50 Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Invensi dan Inovasi / Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Inventor/ masyarakat pemenang Kreativitas Inovasi Masyarakat (KRENOVA)
4	Hilirisasi Produk Unggulan dengan Semangat Ekonomi Hijau	Kajian Pemetaan Potensi Produk Unggulan di Jawa Tengah	1 Dokumen	Program Riset dan Inovasi Daerah / Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan / Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	OPD Prov Jateng, Pemda Kab/Kota, Perguruan Tinggi

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan Perangkat Daerah

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran dengan dukungan sumber daya yang dimiliki. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Kinerja penyelenggaraan bidang urusan ditunjukkan dengan progres pencapaian target indikator kinerja di dalam Renstra yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program kerja dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 melalui upaya perwujudan tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, telah disusun indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada.

Indikator kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tergambar dalam tabel 4.3 yang bersumber dari tabel 4.1.

Tabel 4.3

Penetapan Indikator Kinerja Utama BRIDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kapabilitas Inovasi	4,51	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69	4,70	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	73,41	73,50	73,75	74	74,25	74,50	74,75	
3	Indeks Inovasi Daerah	65,40	72,85	73	73,5	74	74,5	75	75,5	
4	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	92,75	85	86	87	88	89	90	
6	Indeks Manajemen Risiko	NA	2,55	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

No	Program	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun (%)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Progam Riset dan Inovasi	Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang punya kedudukan sangat penting dalam proses tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan khususnya selama 5 (Lima) tahun ke depan. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan bidang penelitian dan pengembangan di Jawa Tengah.

Sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki mandat dalam bidang riset dan inovasi, BRIDA Provinsi Jawa Tengah diharapkan menjadi penggerak utama dalam penguatan ekosistem inovasi yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis pada kebutuhan strategis daerah. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini, BRIDA akan memperkuat fungsi perumusan kebijakan berbasis bukti, fasilitasi hilirisasi inovasi, pemetaan kebutuhan riset tematik, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang bersifat lintas sektor.

Renstra ini juga disusun dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, baik global, nasional, maupun regional, yang terus mengalami perubahan pesat. Berbagai tantangan seperti disrupsi teknologi, perubahan iklim, krisis pangan dan energi, serta transformasi digital memerlukan pendekatan pembangunan yang adaptif dan berbasis pengetahuan. Dalam konteks ini, BRIDA berperan penting untuk memastikan bahwa proses perumusan kebijakan pembangunan daerah dapat ditopang oleh hasil riset yang relevan, inovatif, dan kontekstual.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik

di lingkup pemerintahan daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun masyarakat sipil. BRIDA tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus menjadi simpul penghubung (knowledge broker) antara pengetahuan ilmiah dengan kebutuhan praktis pembangunan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, sumber daya manusia, infrastruktur riset, serta sistem pemantauan dan evaluasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan strategi yang dirumuskan dalam Renstra ini.

Dokumen ini diharapkan sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (Lima) tahun ke depan. Renstra ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders di lingkungan BRIDA Provinsi Jawa Tengah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Disamping itu, dokumen ini juga sekaligus sebagai petunjuk arah strategis untuk mengukur kinerja tahunan BRIDA Provinsi Jawa Tengah yang akan tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selanjutnya, semoga Renstra ini segera diimplementasikan dan diperhatikan akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Mencermati kondisi lapangan dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika, tentunya Renstra BRIDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa akan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dengan demikian, penting bagi BRIDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 untuk mengedepankan aspek perencanaan dokumen serta fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan Perangkat Daerah, Kabupaten/ Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam bersama-sama mewujudkan tujuan pembangunan riset dan inovasi daerah Provinsi Jawa Tengah.

POHON KINERJA RISET DAN INOVASI

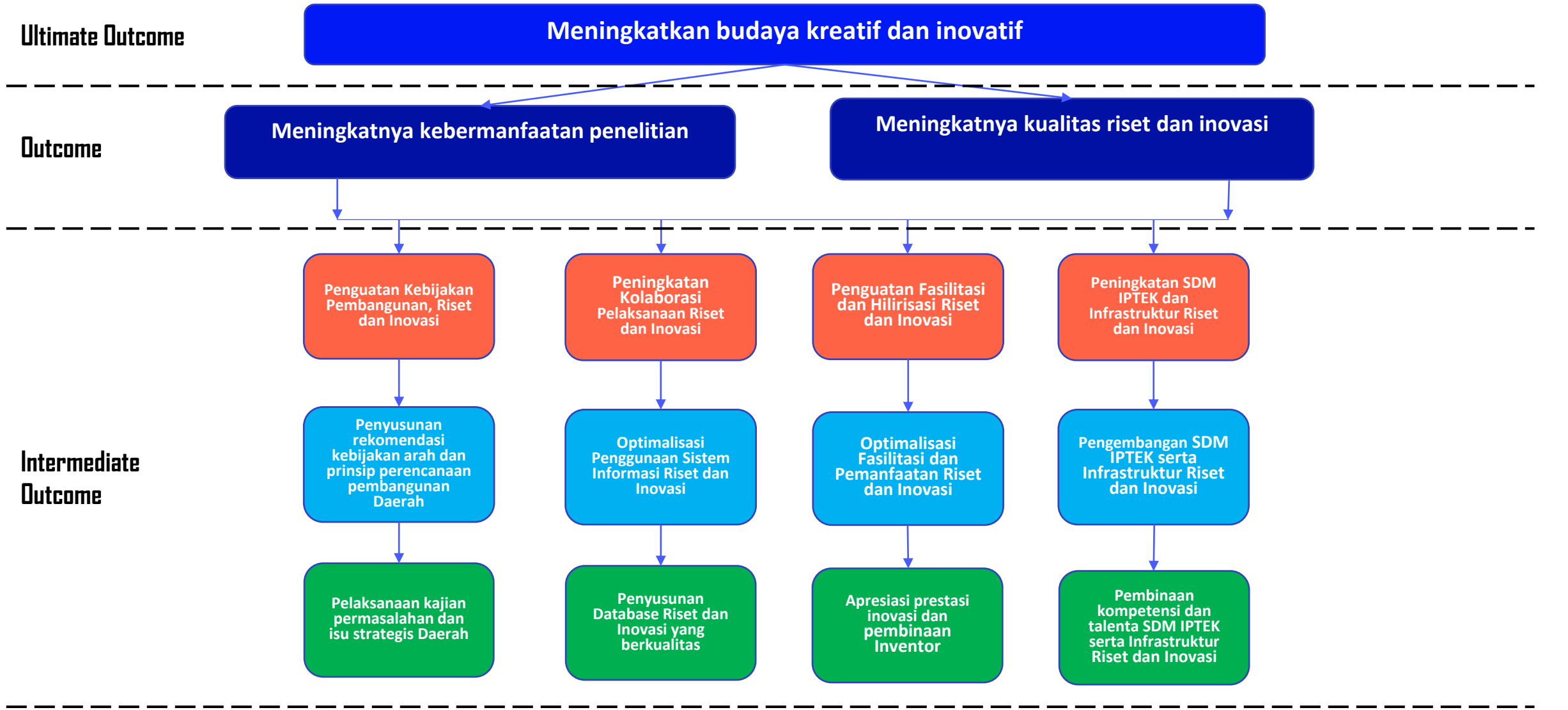

Tujuan

Meningkatkan budaya kreatif dan inovatif

Nilai Kapabilitas Inovasi

Target : 2025 : 4,80 ; 2026 : 4,81 ; 2027 : 4,82 ; 2028 : 4,83 ; 2029 : 4,86

Sasaran

Meningkatnya kebermanfaatan penelitian

Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Dimanfaatkan
Target : 2025: 100% ; 2026: 100% ; 2027: 100% ; 2028: 100% ; 2029: 100% ; 2030: 100%

Meningkatnya kualitas riset dan inovasi

Indeks Inovasi Daerah
Target: 2025: 73 ; 2026: 73,5 ; 2027: 74 ; 2028: 74,5 ; 2029: 75

Program

Program Riset dan Inovasi Daerah

Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah (Jumlah Dokumen Pengkajian kebijakan riset dan inovasi di bagi jumlah prioritas daerah X 100%) **Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi**	Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target (Jumlah Dokumen penelitian yang disusun dibagi dengan target X 100%) **Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi**	Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target (jumlah fasilitasi dan pemanfaatan riset inovasi dibagi target yang ditetapkan dibagi 100%) **Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi**	Persentase Penguatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan (Jumlah SDM Iptek dan infrastuktur yang dikuatkan dibagi dengan kondisi awal X 100%) **Bidang SDM IPTEK & Infrastruktur Riset & Inovasi**
Target : 2025: 100 % ; 2026: 100 % ; 2027: 100 % ; 2028: 100 % ; 2029: 100 %; 2030: 100%	**Target : 2025: 100% ; 2026: 100% ; 2027: 100% ; 2028: 100% ; 2029: 100% ;**	**Target : 2025: 100 % ; 2026: 100 % ; 2027: 100 % ; 2028: 100 % ; 2029: 100 %; 2030: 100%**	**Target : 2025: 100 % ; 2026: 100 % ; 2027: 100 %; 2028: 100 % ; 2029: 100 % ;**

Kegiatan

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	**Invensi dan Inovasi**	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	**Invensi dan Inovasi**	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	**Invensi dan Inovasi**	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	**Invensi dan Inovasi**
Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan riset dan pembangunan Daerah	**Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Indikator riset dan inovasi**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penelitian**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Inovasi**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Pemanfaatan Inovasi**	**Jumlah Dokumen Pengembangan SDM IPTEK**	**Jumlah Dokumen Pembinaan Infrastruktur Riset dan Inovasi**
Target : 2025 : 2 dok, 2026 : 2 dok, 2027 : 2 dok, 2028 : 2 dok, 2029 : 2 dok,	**Target : 2025 : 1 dok, 2026 : 1 dok, 2027 : 1 dok, 2028 : 1 dok, 2029 : 1 dok,**	**Target : 2025 : 1 dok, 2026 : 1 dok, 2027 : 1 dok, 2028 : 1 dok, 2029 : 1 dok,**	**Target : 2025 : 1 dok, 2026 : 1 dok, 2027 : 1 dok, 2028 : 1 dok, 2029 : 1 dok,**	**Target : 2025 : 1 dok, 2026 : 1 dok, 2027 : 1 dok, 2028 : 1 dok, 2029 : 1 dok,**	**Target : 2025 : 1 dok, 2026 : 1 dok, 2027 : 1 dok, 2028 : 1 dok, 2029 : 1 dok,**	**Target : 2025 : 1 dok, 2026 : 1 dok, 2027 : 1 dok, 2028 : 1 dok, 2029 : 1 dok,**	**Target : 2025 : 1 dok, 2026 : 1 dok, 2027 : 1 dok, 2028 : 1 dok, 2029 : 1 dok,**

SubKegiatan

Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	**Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk RIPJ-PID dan teknologi di daerah** **Target :** **2025 : 1 dok,** **2026 : 1 dok,** **2027 : 1 dok,** **2028 : 1 dok,** **2029 : 1 dok,**	**Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset**	**Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset** **Target :** **2025 : 3 Naskah** **2026 : 3 Naskah** **2027 : 3 Naskah** **2028 : 3 Naskah** **2029 : 3 Naskah**	**Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi**	**Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi** **Target :** **2025 : 3 Laporan** **2026 : 3 Laporan** **2027 : 3 Laporan** **2028 : 3 Laporan** **2029 : 3 Laporan**	**Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan**	**Jumlah laporan hasil fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan** **Target :** **2025 : 4 Laporan** **2026 : 4 Laporan** **2027 : 4 Laporan** **2028 : 4 Laporan** **2029 : 4 Laporan**	**Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi**	**Jumlah laporan hasil fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi** **Target :** **2025 : 4 Laporan** **2026 : 4 Laporan** **2027 : 4 Laporan** **2028 : 4 Laporan** **2029 : 4 Laporan**	**Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan**	**Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi** **Target :** **2025 : 1 Laporan** **2026 : 1 Laporan** **2027 : 1 Laporan** **2028 : 1 Laporan** **2029 : 1 Laporan**	**Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi**	**Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi** **Target :** **2025 : 1 Lap** **2026 : 1 Lap** **2027 : 1 Lap** **2028 : 1 Lap** **2029 : 1 Lap**	**Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual**	**Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual** **Target :** **2025 : 1 Lap 2026 : 1 Lap 2027 : 1 Lap** **2028 : 1 Lap** **2029 : 1 Lap**	**Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi**	**Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi** **Target :** **2025 : 1 Lap** **2026 : 1 Lap** **2027 : 1 Lap** **2028 : 1 Lap** **2029 : 1 Lap**	**Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan**	**Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Litbangjirap, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Litbangjirap** **Target :** **2025 : 3 Laporan** **2026 : 3 Laporan** **2027 : 3 Laporan** **2028 : 3 Laporan** **2029 : 3 Laporan**	**Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi**	**Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi** **Target :** **2025 : 1 Laporan** **2026 : 1 Laporan** **2027 : 1 Laporan** **2028 : 1 Laporan** **2029 : 1 Laporan**	**Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah**	**Jumlah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah** **Target :** **2025 : 1 Laporan** **2026 : 1 Laporan** **2027 : 1 Laporan** **2028 : 1 Laporan** **2029 : 1 Laporan**

Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Perencanaan yang berbasis risiko menjadi hal penting agar sejak awal perencanaan, perangkat daerah sudah dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang, dan sudah dilakukan upaya mitigasi sejak awal. Oleh karena itu dalam menyusun Renstra ini, manajemen risiko menjadi proses yang terintegrasi dan dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Renstra PD. Proses manajamen risiko berdasarkan pada Pergub Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a. Identifikasi Risiko

Tabel Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Kurangnya hilirisasi hasil riset	Risiko Strategis	Kurangnnya kesadaran dan apresiasi terhadap inovasi	Ekosistem inovasi menjadi lemah	BRIDA Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya kebermanfaatan penelitian	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti	Lemahnya Pemanfaatan Hasil Pengkajian untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	Risiko Strategis	Regulasi yang kurang mendukung hilirisasi hasil riset	Berkurangnya Pengarusutamaan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	BRIDA Provinsi Jawa Tengah
3	Sasaran Operasional	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sumberdaya (SDM, Sarpras) Riset dan Inovasi kurang memadai	Risiko Operasional	Kurangnya penyediaan sumberdaya (SDM, Sarpras) Riset dan Inovasi	Belum semua penyelenggaraan Pelayanan urusan riset dan inovasi dilaksanakan dengan optimal	BRIDA Provinsi Jawa Tengah
4	Sasaran Operasional	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	Identifikasi risiko kurang mendalam serta komperenhensif	Risiko Operasional	belum semua SDM memahami dan tahu tentang pengelolaan Manajemen Risiko	terdapat banyak risiko yang tidak teridentifikasi	BRIDA Provinsi Jawa Tengah

b. Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurangnya hilirisasi hasil riset	4	4	16	Ada	Pelaporan Indeks Inovasi, Diseminasi Inovasi	Memadai	3	3	9
Lemahnya Pemanfaatan Hasil Pengkajian untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	3	4	12	Ada	Mengoptimalkan Forum komunikasi riset dan inovasi serta pemberian Anugerah Riset	Memadai	3	3	9
Sumberdaya (SDM, Sarpras) Riset dan Inovasi kurang memadai	4	3	12	Ada	Penyediaan SDM dan sarpras (gedung kantor, peralatan, perlengkapan) riset dan inovasi secara bertahap	Memadai	3	3	9
Identifikasi risiko kurang mendalam serta komperenhensif	4	4	16	Ada	melakukan sosialisasi ke internal BRIDA dan melakukan bimtek	Memadai	3	3	9

c. Penetapan Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemlik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Kurangnya hilirisasi hasil riset	16	Kepala BRIDA Provinsi Jawa Tengah	Kurangnnya kesadaran dan apresiasi terhadap inovasi	Ekosistem inovasi menjadi lemah
Lemahnya Pemanfaatan Hasil Pengkajian untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	12	Kepala BRIDA Provinsi Jawa Tengah	Regulasi yang kurang mendukung hilirisasi hasil riset	Berkurangnya Pengarusutamaan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi
Sumberdaya (SDM, Sarpras) Riset dan Inovasi kurang memadai	12	Kepala BRIDA Provinsi Jawa Tengah	Kurangnya penyediaan sumberdaya (SDM, Sarpras) Riset dan Inovasi	Belum semua penyelenggaraan Pelayanan urusan riset dan inovasi dilaksanakan dengan optimal
Identifikasi risiko kurang mendalam serta komperenhensif	16	Kepala BRIDA Provinsi Jawa Tengah	belum semua SDM memahami dan tahu tentang pengelolaan Manajemen Risiko	terdapat banyak risiko yang tidak teridentifikasi

d. Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	PJ	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas riset dan inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Kurangnya hilirisasi hasil riset	16	Kurangnnya kesadaran dan apresiasi terhadap inovasi	Ekosistem inovasi menjadi lemah	Pelaporan Indeks Inovasi didukung dengan Diseminasi Inovasi	Kepala BRIDA Provinsi Jawa Tengah	2030
Meningkatnya kebermanfaatan penelitian	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti	Lemahnya Pemanfaatan Hasil Pengkajian untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	12	Regulasi yang kurang mendukung hilirisasi hasil riset	Berkurangnya Pengarusutamaan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Mengoptimalkan Forum komunikasi riset dan inovasi serta pemberian Anugerah Riset	Kepala BRIDA Provinsi Jawa Tengah	2030
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sumberdaya (SDM, Sarpras) Riset dan Inovasi kurang memadai	12	Kurangnya penyediaan sumberdaya (SDM, Sarpras) Riset dan Inovasi	Belum semua penyelenggaraan Pelayanan urusan riset dan inovasi dilaksanakan dengan optimal	Penyediaan SDM dan sarpras (gedung kantor, peralatan, perlengkapan) riset dan inovasi secara bertahap	Kepala BRIDA Provinsi Jawa Tengah	2030
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Identifikasi risiko kurang mendalam serta komperenhensif	16	belum semua SDM memahami dan tahu tentang pengelolaan Manajemen Risiko	terdapat banyak risiko yang tidak teridentifikasi	melakukan sosialisasi ke internal BRIDA dan melakukan bimtek	Kepala BRIDA Provinsi Jawa Tengah	2030

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

Bapenda
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses untuk menentukan langkah-langkah yang tepat di masa depan melalui pilihan yang berurutan, dengan melibatkan sumber daya yang ada. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa SPPN adalah sistem tata cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana pembangunan daerah bagi pemerintah daerah merupakan bagian dari SPPN, yang disusun bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan rencana pembangunan daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal, serta mengikuti dinamika perkembangan di tingkat daerah dan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah mencakup rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Salah satu rencana perangkat daerah adalah Rencana Strategis (Renstra), yang berisi perencanaan selama lima tahun dan mencakup unsur-unsur pembangunan dalam urusan pemerintahan wajib dan pilihan, sesuai dengan RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 memiliki urgensi yang sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan kondisi eksternal dan internal. Renstra ini disusun selaras dengan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang daerah. Renstra Bapenda memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Proses penyusunannya dilakukan dengan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan secara realistis, sekaligus memperhitungkan dinamika lingkungan strategis. Fungsi utama Renstra Bapenda adalah untuk memudahkan pelaksanaan program dan kegiatan, kontrol terhadap seluruh aktivitas, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta untuk mengukur hasil yang harus dicapai dan kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra Bapenda merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu. Seluruh tahapan dan mekanismenya memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan, serta keselarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029. Penyusunan indikator target Renstra Bapenda dalam proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan prinsip keberlanjutan dan optimalisasi sumber daya daerah. Proyeksi PAD didasarkan pada teknik analisis yang sama dalam penyusunan proyeksi PAD pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Berikutnya dalam rangka menghadapi tantangan kemandirian fiskal daerah, maka penting untuk memastikan keberlanjutan sumber pendapatan daerah dengan melakukan kajian potensi pendapatan berbasis wilayah secara berkala, melakukan perbaikan tatakelola dan sistem pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, restrukturisasi proses bisnis BUMD dan optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan PAD khususnya retribusi daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Negara Nomor 6881);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomon Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7 Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3 Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penanganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153):
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159):

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5-66/2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7 Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal di lingkungan Bapenda Provinsi Jawa Tengah;
2. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2025-2029;
3. Menetapkan indikator dan target kinerja Bapenda Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran untuk mendukung capaian indikator kinerja pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Tengah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU STRATEGIS BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

Bapenda
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU STRATEGIS BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 menggambarkan beberapa aspek urgensi yang menjadi dasar pertimbangan penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi ke depan. Aspek-aspek tersebut mencerminkan kondisi lingkungan strategis yang memengaruhi peran dan fungsi Bapenda, serta menjadi pijakan dalam memastikan keselarasan antara pelaksanaan tugas kelembagaan dan dinamika pembangunan daerah. Tiga aspek utama yaitu:

2.1.1 Aspek Dinamika Regulasi

Berdasarkan fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir, terdapat dinamika regulasi yang signifikan dibidang pajak dan retribusi daerah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sejumlah regulasi baru telah diterbitkan, yang secara langsung memengaruhi pengelolaan pajak dan retribusi di tingkat daerah, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Implementasi dari regulasi ini membawa perubahan substansial, seperti pengenalan konsep opsen pajak (Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB), penambahan jenis pajak baru yang dipungut oleh pemerintah provinsi seperti Pajak Alat Berat serta rasionalisasi beberapa objek retribusi daerah.

Bapenda Provinsi Jawa Tengah telah mengambil langkah konkret dalam kurun waktu 2022–2025 sebagai respon terhadap perubahan regulasi yang terjadi. Langkah-langkah dimaksud antara lain dengan menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);
3. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;

4. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan Pemeriksaan Pajak Bahan Bahan Kendaraan Bermotor
5. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah Tentang Petunjuk Teknis Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Air Permukaan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Alat Berat;
9. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Retribusi Daerah;
11. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Kepala. PT Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Nomor KB/1/XI/2021, 973/17.698, P/32/SP/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Samsat Jawa Tengah;
12. Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah Dan Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971/05.736/III/2023 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pokok Pajak, Keringanan Sanksi Administratif Dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/7/2024 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pengawasan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900.1.13.1/10/I/2025 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

16. Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900.1.13.1/11/I/2025 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Permukaan;
17. Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900.1.13.1/12/I/2025 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pemungutan Pajak Alat Berat.

Kebijakan-kebijakan tersebut menuntut adanya percepatan (akselerasi) dan penyebarluasan informasi (diseminasi) kepada seluruh unit kerja Bapenda. Hal ini penting agar tata kelola perpajakan dan retribusi dapat dijalankan secara lebih adaptif dan responsif, demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.

2.1.2 Aspek Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045", terdapat misi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan integritas. Misi ini secara langsung berkaitan dengan penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu dari delapan indikator keberhasilan pembangunan, termasuk indeks reformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi, hingga tingkat pengangguran terbuka.

Untuk mencapai otonomi fiskal, strategi yang diterapkan mencakup tiga pendekatan utama: program intervensi, program taktis, dan program aksi. Program intervensi menekankan pada riset potensi daerah secara berkala serta inventarisasi aset potensial yang dikelola secara terkoordinasi oleh UPPD bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sementara itu, program taktis meliputi perbaikan tata kelola SAMSAT guna memaksimalkan pendapatan daerah dan pemberian insentif kepada pemungut pajak dan retribusi. Adapun program aksi mencakup optimalisasi pemanfaatan aset pemda yang terintegrasi dalam Daftar Induk Objek Retribusi (DIOR) dan restrukturisasi proses bisnis serta tata kelola retribusi daerah. Seluruh upaya ini merupakan langkah terukur Bapenda untuk memperkuat basis pendapatan daerah demi mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah.

2.1.3 Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis mencerminkan kondisi faktual, bahwa terdapat beberapa permasalahan penting yang masih terjadi. Pertama, hasil evaluasi dan pembahasan terhadap daftar inventarisasi masalah menunjukkan bahwa selama enam tahun berturut-turut target kinerja yang ditetapkan belum tercapai, hal tersebut menandakan adanya hambatan serius dalam pencapaian tujuan pembangunan. Kedua, terdapat tantangan dalam pengelolaan dan pencapaian target pendapatan ke depan, terutama dalam konteks pengelolaan basis data

pajak daerah dan retribusi daerah, pengembangan sistem informasi pelayanan pajak dan retribusi daerah serta digitalisasi pelayanan dan elektronifikasi transaksi, yang menuntut kesiapan sistem dan sumber daya. Ketiga, belum optimalnya sinergitas dalam pemungutan Opsen dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta Perangkat Organisasi lainnya. Keempat, belum optimalnya pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Bapenda Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Pasal 3 huruf e angka 3 disebutkan bahwa Bapenda Provinsi Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pendapatan. Selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja serta unit kerja di perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatur dengan Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapenda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugas Bapenda melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, bidang pengelolaan pajak daerah, bidang pengelolaan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah, dan bidang pengendalian dan evaluasi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, bidang pengelolaan pajak daerah, bidang pengelolaan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah, dan bidang pengendalian dan evaluasi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, bidang pengelolaan pajak daerah, bidang pengelolaan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah, dan bidang pengendalian dan evaluasi;
d. pembinaan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan, bidang pengelolaan pajak daerah, bidang pengelolaan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah, dan bidang pengendalian dan evaluasi;
e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Susunan Organisasi Bapenda Provinsi Jawa Tengah terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
   1) Kepala Subbagian Program;
   2) Kepala Subbagian Keuangan; dan
   3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, membawahi:
   1) Kepala Subbidang Analisis Data dan Perencanaan Pendapatan;
   2) Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan.
d. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, membawahi:
   1) Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak;
   2) Kepala Subbidang Keberatan dan Penagihan Pajak.
e. Kepala Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah, membawahi:
   1) Kepala Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain;
   2) Kepala Subbidang Pemanfaatan Aset.
f. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi:
   1) Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pajak;
   2) Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset.
g. Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini adalah uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang yang ada di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah :

a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat melaksanakan fungsi:
   1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
   2. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
   3. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
   4. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
   5. pengelolaan informasi dan dokumentasi;

6. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
7. penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan melaksanakan fungsi:
   1. perumusan kebijakan terkait analisis data dan perencanaan pendapatan dan pengembangan pendapatan;
   2. pelaksanaan kebijakan terkait analisis data dan perencanaan pendapatan dan pengembangan pendapatan;
   3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait analisis data dan perencanaan pendapatan dan pengembangan pendapatan;
   4. monitoring dan evaluasi terkait analisis data dan perencanaan pendapatan dan pengembangan pendapatan;
   5. pelaporan dan rekomendasi terkait analisis data dan perencanaan pendapatan dan pengembangan pendapatan;
   6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pajak daerah.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melaksanakan fungsi:
   1. perumusan kebijakan terkait pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak serta keberatan dan penagihan pajak;
   2. pelaksanaan kebijakan terkait pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak serta keberatan dan penagihan pajak;
   3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak serta keberatan dan penagihan pajak;
   4. monitoring dan evaluasi terkait pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak serta keberatan dan penagihan pajak
   5. pelaporan dan rekomendasi terkait pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak serta keberatan dan penagihan pajak;
   6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan retribusi daerah, pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah melaksanakan fungsi:

1. perumusan kebijakan terkait pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lain serta pemanfaatan aset daerah;
2. pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lain serta pemanfaatan aset daerah;
3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lain serta pemanfaatan aset daerah;
4. monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lain serta pemanfaatan aset daerah;
5. pelaporan dan rekomendasi terkait pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lain serta pemanfaatan aset daerah;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian dan Evaluasi melaksanakan fungsi:

1. perumusan kebijakan terkait pengendalian dan evaluasi kinerja pajak serta pengendalian dan evaluasi kinerja retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset;
2. pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian dan evaluasi kinerja pajak serta pengendalian dan evaluasi kinerja retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset;
3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian dan evaluasi kinerja pajak serta pengendalian dan evaluasi kinerja retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset;
4. monitoring dan evaluasi terkait pengendalian dan evaluasi kinerja pajak serta pengendalian dan evaluasi kinerja retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset;
5. pelaporan dan rekomendasi terkait pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lain serta pemanfaatan aset daerah;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Unit Pengelola Pendapatan Daerah kelas A merupakan unsur pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan pendapatan daerah. Unit Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Badan di bidang pelayanan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain dan pemanfaatan aset;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain dan pemanfaatan aset;
c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain dan pemanfaatan aset;
d. pengelolaan ketatausahaan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

UPPD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Unit membawahi:

a. Kepala Subbagian Tata Usaha;
b. Kepala Seksi Pelayanan Pajak Daerah;
c. Kepala Seksi Pelayanan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Bab IV pasal 13 Unit Pengelolaan Basis Data Pajak Dan Retribusi Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas operasional dibidang pengelolaan basis data pajak dan retribusi. Selanjutnya dalam pasal 14 Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pengelolaan basis data pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugas Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan sistem informasi pendapatan serta pengelolaan basis data pendapatan;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan sistem informasi pendapatan serta pengelolaan basis data pendapatan;
c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi pendapatan serta pengelolaan basis data pendapatan;
d. pengelolaan ketatausahaan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Unit membawahi:

a. Kepala Subbagian Tata Usaha;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan Unit Pengelolaan Teknis Daerah (UPTD) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada gambar berikut:

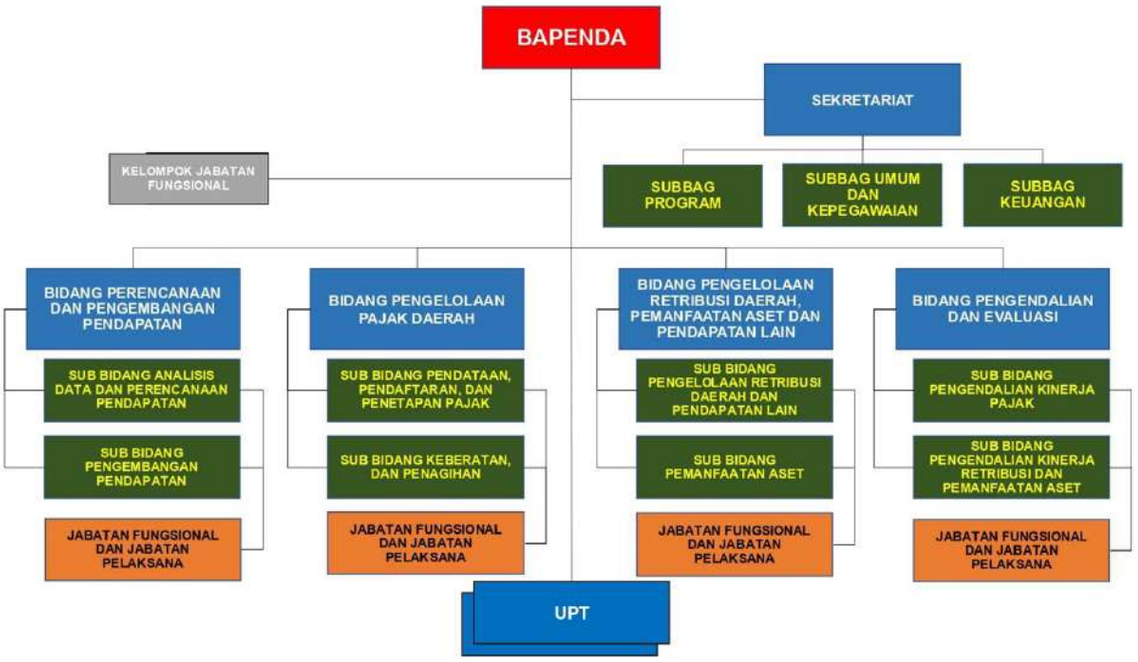

Gambar II-1 Bagan Struktur Organisasi Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Bapenda Jawa Tengah, 2025

Gambar II-2 Bagan Struktur Organisasi UPPD Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Bapenda Jawa Tengah, 2025

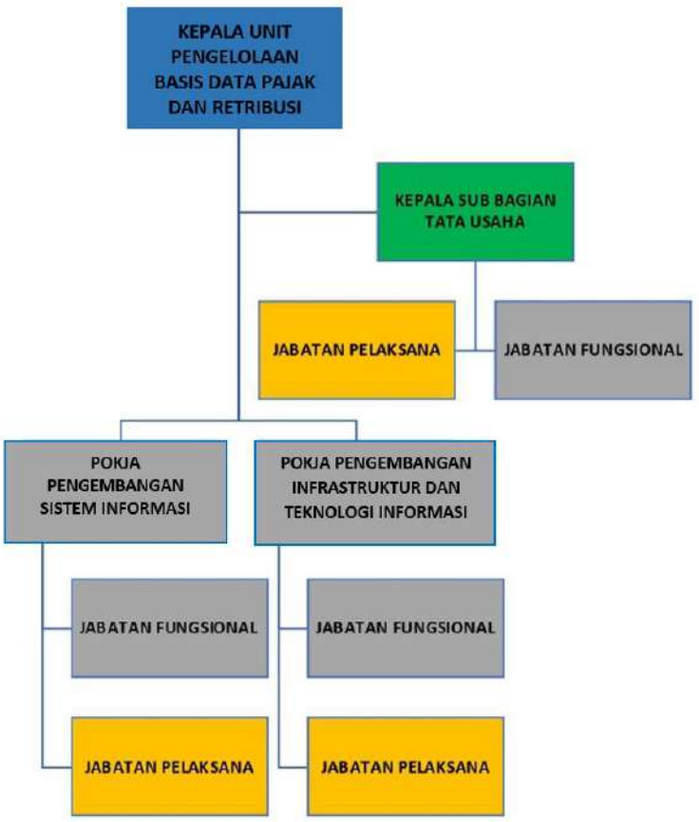

Gambar II-3 Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Bapenda Jawa Tengah, 2025

2.2 Sumber Daya Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bapenda Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 3 (tiga) sumber daya organisasi utama antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), Aset/Modal dan adanya Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ketiga sumber daya organisasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Sumber Daya Manusia memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayan publik. Data pegawai Bapenda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel II.1 Data Pegawai Bapenda Provinsi Jawa Tengah

NO	UNIT KERJA	PNS						TENAGA KONTRAK		
		STRUKTURAL			PELAKSANA					
		ES II	ES III	ES IV	CPNS	PNS	PPPK	PHL	TENAGA TEKNIS PUSAT	TENAGA TEKNIS UPPD
1.	Kantor Bapenda Provinsi Jawa Tengah	1	4	8	0	22	19	34	6	6
2.	UPPD se-Jateng	0	28	77	0	481	77	115	18	100
Jumlah		**1**	**32**	**85**	**0**	**503**	**96**	**149**	**24**	**106**

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data kepegawaian per Juni 2025 Bapenda Provinsi Jawa Tengah memiliki SDM Aparatur sebanyak 503 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 279 orang Tenaga kontrak yang tersebar di seluruh unit kerja Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Dari 503 orang PNS tersebut sebanyak 118 orang menduduki jabatan struktural, yang terdiri atas 32 orang Pejabat Administrator (setara Eselon III), dan 85 orang Pejabat Pengawas (setara Eselon IV), sebanyak 385 orang merupakan pejabat pelaksana yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum.

2.2.2 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sajarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam asset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan asset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan asset. Asset yang tidak memenuhi kriteria tersebut di kategorikan sebagai asset non lancar.

Berdasarkan Laporan Keuangan Bapenda Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit BPK jumlah asset Bapenda Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.671.669.817.608. Terdiri dari Aset lancar sebesar Rp. 2.375.103.530.051, Aset Tetap sebesar Rp. 295.490.850.592 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 1.075.436.965.

a. Aset Lancar

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.375.103.530.051 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.148.246.826.924. Hal ini berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 226.856.703.127 atau turun sebesar 0,11 %. Rincian Aset lancar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah).

Tabel II.2 Aset Lancar Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Aset Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas di Bendahara Penerimaan	15.778.500	6.219.500
2	Kas di Bendahara Pengeluaran		
3	Piutang Pajak Daerah	2.897.664.180.980	2.625.886.012.008
4	Piutang Retribusi		
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Piutang Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		

No	Jenis Aset Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
8	Piutang Transfer Antar Daerah		
9	Piutang Lainnya		
10	Penyisihan Piutang	- 527.521.633.943	- 485.211.844.626
11	Beban Dibayar di Muka	296.195.344	662.538.034
12	Persediaan	4.649.009.170	6.903.902.008
Jumlah		**2.375.103.530.051**	**2.148.246.826.924**

Sumber: Data Subbagian Keuangan Bapenda, 2025

b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 295.490.850.592 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 293.205.412.699 hal ini berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.285.437.893 atau 0,01%. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Tabel II.3 Aset Tetap Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Tanah	108.205.162.582	108.205.162.582
2	Peralatan dan Mesin	197.347.555.980	191.431.956.282
3	Gedung dan Bangunan	243.152.656.439	242.637.153.983
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	417.436.880	417.436.880
5	Aset Tetap Lainnya	468.859.000	472.274.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.341.280	45.341.280
7	Akumulasi Penyusutan	- 254.146.161.569	- 250.003.912.308
Jumlah		**295.490.850.592**	**293.205.412.699**

Sumber: Data Subbagian Keuangan Bapenda, 2024

c. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.075.436.965 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 11.704.230 hal ini menunjukan bahwa terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.063.732.735 atau 90.88%. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Tabel II.4 Aset Lainnya Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Tagihan Jangka Panjang		
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	874.500.000	
3	Aset Tidak Berwujud	648.552.730	287.200.000
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 347.206.495	- 287.200.000
5	Aset Lain- Lain	18.383.546.304	11.667.780.492
6	Akumulasi Penyusutan Lain- Lain	- 18.483.955.574	- 11.656.076.262
7	Tagihan Jangka Panjang		
Jumlah		**1.075.436.965**	**11.704.230**

Sumber: Data Subbagian Keuangan Bapenda, 2025

Pada bagian ini dapat digambarkan pula beberapa aset yang dimiliki oleh Bapenda Provinsi Jawa Tengah, antara lain sampaikan dalam tabel berikut:

Tabel II.5 Aset Yang Dimiliki Bapenda Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2024

No	Keterangan	Satuan	Jumlah
1	Tanah	Bidang	103
2	Alat besar	Unit	150
3	Alat angkutan	Unit	434
4	Alat bengkel dan alat ukur	Unit	17
5	Alat pertanian	Unit	-
6	Alat kantor dan rumah tangga	Unit	21.048
7	Alat studio komunikasi dan pemancar	Unit	899
8	Alat kedokteran dan alat kesehatan	Unit	71
9	Alat laboratorium	Unit	10
10	Alat persenjataan	Unit	-
11	Alat komputer	Unit	5.241
12	Alat eksplorasi	Unit	-
13	Alat pengeboran	Unit	-
14	Alat produksi, pengelolaan dan pemurnian	Unit	1
15	Alat bantu eksplorasi	Unit	-
16	Alat keselamatan kerja	Unit	-
17	Alat peraga	Unit	-
18	Peralatan porses/produksi	Unit	-
19	Rambu rambu	Unit	-
20	Peralatan olah raga	Unit	27
21	Bangunan gedung	Unit	119
22	Monumen	Unit	-
23	Bangunan menara	Unit	1
24	Tugu titik kontrol/pasti	Unit	7
25	Jalan dan jembatan	Unit	-
26	Bangunan air	Unit	2
27	Instalasi	Unit	3
28	Jaringan	Unit	-
29	Bahan perpustakaan	Unit	390
30	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	Unit	178
31	Hewan	Unit	-
32	Biota perairan	Unit	-
33	Tanaman	Unit	-
34	Barang koleksi non budaya	Unit	-
35	Aset tetap dalam renovasi	Unit	-
36	Konstruksi dalam pengerjaan	Unit	1
Jumlah			**28.702**

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.2.3 Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)

Bapenda Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki cakupan wilayah pelayanan dan titik pelayanan. Titik-titik pelayanan ini berperan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan perpajakan daerah serta optimalisasi PAD Jawa Tengah. Titik pelayanan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.6 Titik Pelayanan UPPD Kabupaten/Kota Bapenda Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Layanan	Jumlah Titik
1	Samsat Induk	37 titik
2	Samsat Pembantu	10 titik
3	Samsat Paten	31 titik
4	Samsat Gerai	24 titik
5	Samsat Drivethru	6 titik

No	Jenis Layanan	Jumlah Titik
6	Samsat Keliling	63 titik
7	Samsat Siaga/Samsat Gendong	54 titik
8	MPP	12 titik
9	Samsat Budiman	348 titik

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berikut informasi mengenai Titik UPPD di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel II.7 Wilayah Pelayanan UPPD Kabupaten/Kota Bapenda Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Nomenklatur	Wilayah Pelayanan	
			Jumlah Titik	Lokasi
1	Semarang I	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I	4 Gerai	- Gerai Lotte Mart - Gerai Bank Jateng - Gerai Mall Ciputra Gerai Tlogosari Kulon
			3 Smkel	- Samkel 1 Semarang 1 - Samkel 2 Semarang 1 - Samkel 3 Semarang 1
2	Semarang II	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II	1 Gerai	- Gerai BPKB Lamper
			3 Samkel	- Samkel 1 Semarang 2 - Samkel 2 Semarang 2 - Samkel 3 Semarang 2
3	Semarang III	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III	2 Gerai	- Gerai Mijen Semarang 3 - Gerai Unnes
			3 Samkel	- Samkel 1 Semarang 3 - Samkel 2 Semarang 3 - Samkel 3 Semarang 3
4	Salatiga	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga	1 Gerai	- Gerai MPP Salatiga
			2 Samkel	- Samkel 1 Salatiga - Samkel 2 Salatiga
5	Kab. Semarang	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran	7 Gerai	- Gerai Bergas - Gerai Sumowono - Gerai Ambarawa - Gerai MPP Ungaran - Gerai Paseban Ungaran - Gerai Pendopo Ungaran
			3 Samkel	- Samkel 1 Ungaran - Samkel 2 Ungaran - Samkel 3 Ungaran
6	Kendal	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal	3 Gerai	- Gerai Kaliwungu - Gerai Boja - Gerai Weleri Kendal
			2 Samkel	- Samkel 1 Kendal - Samkel 2 Kendal

No	Kabupaten/Kota	Nomenklatur	Wilayah Pelayanan	
			Jumlah Titik	Lokasi
7	Demak	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak	4 Gerai	- Gerai Mijen Demak - Gerai Sayung - Gerai Mranggen - Gerai MPP Demak
			4 Samkel	- Samkel 1 Demak - Samkel 2 Demak - Samkel 3 Demak - Samkel 4 Demak
8	Grobogan	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi	5 Gerai	- Gerai Wirosari - Gerai Gubug - Gerai Samsat BKK - Gerai MPP Grobogan - Gerai Pulo Kulon
			3 Samkel	- Samkel 1 Grobogan - Samkel 2 Grobogan - Samkel 3 Grobogan
9	Surakarta	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	2 Gerai	- Gerai Drive Thru Pasar Keliwon - Gerai Drive Thru Grab Ovo
			2 Samkel	- Samkel 1 Surakarta - Samkel 2 Surakarta
10	Sukoharjo	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo	3 Gerai	- Gerai The Park Mall - Gerai Singopuran - Gerai MPP Sukoharjo
			2 Samkel	- Samkel 1 Sukoharjo - Samkel 2 Sukoharjo
11	Klaten	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten	1 Gerai	- Gerai MPP Klaten
			3 Samkel	- Samkel 1 Klaten - Samkel 2 Klaten - Samkel 3 Klaten
			2 Pembantu	- Samsat Prambanan - Samsat Delanggu
12	Boyolali	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali	1 Gerai	- Gerai MPP Boyolali
			4 Samkel	- Samkel 1 Boyolali - Samkel 2 Boyolali

No	Kabupaten/Kota	Nomenklatur	Wilayah Pelayanan	
			Jumlah Titik	Lokasi
				- Samkel 3 Boyolali - Samkel 4 Boyolali
13	Sragen	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen	3 Gerai	- Gerai Paten Gemolong - Gerai Paten Tanon - Gerai MPP Sragen
			3 Samkel	- Samkel 1 Sragen - Samkel 2 Sragen - Samkel 3 Sragen
14	Karanganyar	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar	1 Gerai	- Gerai MPP Karanganyar
			2 Samkel	- Samkel 1 Karanganyar - Samkel 2 Karanganyar
15	Wonogiri	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri	2 Gerai	- Gerai Paten Eromoko - Gerai Toko Baru
			3 Samkel	- Samkel 1 Wonogiiri - Samkel 2 Wonogiri - Samkel 3 Wonogiri
			2 Pembantu	- Samsat Purwantoro - Samsat Baturetno
16	Pati	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati	1 Gerai	- Gerai Drive Thru Pati
			4 Samkel	- Samkel 1 Pati - Samkel 2 Pati - Samkel 3 Pati - Samkel 4 Pati
17	Kudus	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus	1 Gerai	- Gerai MPP Kudus
			4 Samkel	- Samkel 1 Kudus - Samkel 2 Kudus - Samkel 3 Kudus - Samkel 4 Kudus
18	Jepara	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara	3 Gerai	- Gerai Kelet - Gerai Paten Mayong - Gerai MPP Jepara
			3 Samkel	- Samkel 1 Jepara - Samkel 2 Jepara - Samkel 3 Jepara

No	Kabupaten/Kota	Nomenklatur	Wilayah Pelayanan	
			Jumlah Titik	Lokasi
19	Rembang	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang	2 Gerai	- Gerai Sarang - Gerai Kaliori
			2 Samkel	- Samkel 1 Rembang - Samkel 2 Rembang
20	Blora	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora	2 Gerai	- Gerai Kunduran - Gerai Randublatung
			4 Samkel	- Samkel 1 Blora - Samkel 2 Blora - Samkel 3 Blora - Samkel 4 Blora
			1 Pembantu	- Samsat Cepu
21	Kota Pekalongan	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan	1 Gerai	- Gerai Drive Thru Pekalongan
			3 Samkel	- Samkel 1 Pekalongan - Samkel 2 Pekalongan - Samkel 3 Pekalongan
22	Pekalongan	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen	2 Gerai	- Gerai Paten Kedungwuni - Gerai MPP Kajen
			4 Samkel	- Samkel 1 Kajen - Samkel 2 Kajen - Samkel 3 Kajen - Samkel 4 Kajen
23	Batang	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang	2 Gerai	- Gerai Paten Limpung - Gerai Paten Gringsing
			4 Samkel	- Samkel 1 Batang - Samkel 2 Batang - Samkel 3 Batang - Samkel 4 Batang
24	Pemalang	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang	3 Samkel	- Samkel 1 Pemalang - Samkel 2 Pemalang - Samkel 3 Pemalang
25	Kota Tegal	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal	1 Gerai	- Gerai MPP Tegal
			3 Samkel	- Samkel 1 Tegal - Samkel 2 Tegal - Samkel 3 Tegal

No	Kabupaten/Kota	Nomenklatur	Wilayah Pelayanan	
			Jumlah Titik	Lokasi
26	Tegal	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi	1 Gerai	- Gerai Slawi
			5 Samkel	- Samkel 1 Slawi - Samkel 2 Slawi - Samkel 3 Slawi - Samkel 4 Slawi - Samkel 5 Slawi
27	Brebes	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes	2 Gerai	- Gerai MPP Brebes - Gerai Paten Larangan
			3 Samkel	- Samkel 1 Brebes - Samkel 2 Brebes - Samkel 3 Brebes
			1 Pembantu	- Samsat Bumiayu - Samsat Tanjung
28	Banyumas	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwokerto	4 Gerai	- Gerai Paten Sokaraja - Gerai Rita Mall - Gerai MPP Purwokerjo - Gerai Drive Thru Purwokerto
			4 Samkel	- Samkel 1 Purwokerto - Samkel 2 Purwokerto - Samkel 3 Purwokerto - Samkel 4 Purwokerto
			1 Pembantu	- Samsat Wangon
29	Cilacap	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap	2 Gerai	- Gerai Kroya - Gerai Samsat Malam Cilacap
			4 Samkel	- Samkel 1 Cilacap - Samkel 2 Cilacap - Samkel 3 Cilacap - Samkel 4 Cilacap
			1 Pembantu	- Samsat Majenang
30	Purbalingga	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga	3 Gerai	- Gerai Paten Bukateja - Gerai Malam Purbalingga - Gerai Bobotsari
			4 Samkel	- Samkel 1 Purbalingga - Samkel 2 Purbalingga

No	Kabupaten/Kota	Nomenklatur	Wilayah Pelayanan	
			Jumlah Titik	Lokasi
				- Samkel 3 Purbalingga - Samkel 4 Purbalingga
31	Banjarnegara	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara	2 Gerai	- Gerai Depo Pelita - Gerai MPP Banjarnegara
			3 Samkel	- Samkel 1 Banjarnegara - Samkel 2 Banjarnegara - Samkel 3 Bajartnegara
32	Kota Magelang	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang	2 Gerai	- Gerai Drive Thru Magelang - Gerai MPP MAgelang
			2 Samkel	- Samkel 1 Magelang - Samkel 2 Magelang
33	Magelang	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid	4 Gerai	- Gerai Secang - Gerai Drive Thru Mungkid - Gerai MPP Mungkid - Gerai Kab Magelang Malam
			4 Samkel	- Samkel 1 Mungkid - Samkel 2 Mungkid - Samkel 3 Mungkid - Samkel 4 Mungkid
34	Purworejo	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo	4 Gerai	- Gerai paten Kutoarjo - Gerai Paten Bener - Gerai Paten Pituruh - Gerai MPP Purworejo
			2 Samkel	- Samkel 1 Purworejo - Samkel 2 Purworejo
			1 Pembantu	- Samsat Bagelen
35	Kebumen	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen	3 Gerai	- Gerai Gombong - Gerai MPP Kebumen - Gerai Paten Ayah
			2 Samkel	- Samkel 1 Kebumen - Samkel 2 Kebumen
36	Temanggung	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung	2 Gerai	- Gerai Paten Parakan - Gerai MPP Temanggung
			2 Samkel	- Samkel 1 Temanggung

No	Kabupaten/Kota	Nomenklatur	Wilayah Pelayanan	
			Jumlah Titik	Lokasi
				- Samkel 2 Temanggung
37	Wonosobo	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo	1 Gerai	- Gerai MPP Wonosobo
			2 Samkel	- Samkel 1 Wonosobo - Samkel 2 Wonosobo

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggaraan pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Regulasi tersebut memberikan amanat untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* pada setiap layanan instansi daerah. Bapenda Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu instansi yang melaksanakam Reformasi Birokrasi dengan tujuan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Hal-hal yang menunjang peningkatan pelayanan adalah sebagai berikut :

2.3.1 Organisasi dan Tata Kelola

Tata kelola yang baik selalu ditunjang oleh adanya regulasi dan koordinasi dan kelembagaan. Dari sisi regulasi dilakukan Upaya-upaya penyempurnaan kebijakan yang mendukung peningkatan pelayanan seperti penyesuaian tarif, penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor berdasarkan harga pasaran umum, efisiensi alur pelayanan. Dari sisi koordinasi diperlukan pengembangan Kerjasama lintas sektor, antara lain: kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kab/ Kota, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Negara Lain, dan dengan pihak ketiga (swasta). Dari sisi kelembagaan menyesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi.

2.3.2 Membudayakan pelayanan prima

Pelayanan yang berkualitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik. Amanat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel harus menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang menjadi dasar hukum dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Bapenda Provinsi Jawa Tengah mendukung pembangunan Zona Integritas untuk menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana Penganugerahan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Pengelola Pendapatan Daerah pada Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Semarang pada tahun 2024. Bapenda Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk membudayakan pelayanan prima sebagai

bagian integral dari reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Pelayanan prima diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan wajib pajak dan pemangku kepentingan.

Seluruh unit kerja di lingkungan Bapenda didorong untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama, dengan memastikan terselenggaranya proses yang efisien dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Budaya kerja ini diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan etika pelayanan, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam digitalisasi layanan.

Bapenda Provinsi Jawa Tengah membangun mindset aparatur yang berintegritas dan responsif, serta didukung sistem pengawasan internal yang kuat, Bapenda Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan publik. Upaya ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, akuntabel, dan melayani, serta mempercepat pencapaian predikat WBK dan WBBM secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal diatas, terkait peningkatan kualitas pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, maka diperlukan hal-hal berikut ini:

a. Penggunaan sumber daya manusia yang mencukupi dan berkualitas, serta memberikan *punishment* atau sanksi bagi pelaksana layanan bila melakukan penyelewengan.
b. Optimalisasi titik layanan berdasarkan pengembangan teknologi digital serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan ekonomis serta transparan.
c. Pemeliharaan dan penambahan sarana dan prasarana penunjang layanan.

2.3.3 Partisipasi Masyarakat

Pendapatan pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD dan memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor, namun tidak banyak masyarakat yang menyadari hal tersebut. Manfaat pembayaran pajak dan retribusi daerah tidak langsung diterima oleh masyarakat, sedangkan pemenuhan fasilitas umum baik terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudahan akses transportasi dan mobilitas melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian merupakan manfaat atas pajak dan retribusi daerah. Selain peningkatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik, penerimaan pajak juga bergantung pada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa unsur

diantaranya yaitu : pengetahuan masyarakat akan peran dan manfaat pajak dan retribusi daerah, kemampuan dan kemauan atau kesediaan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Karenanya sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat, Bapenda melakukan edukasi dan sosialisasi pada seluruh unsur masyarakat untuk memberi pemahaman lebih terkait manfaat pajak dan retribusi daerah, selanjutnya untuk menarik minat masyarakat dalam pendapatan retribusi dilakukan upaya peningkatan sarana prasarana dan pelaksanaan promosi tempat usaha serta penyediaan kemudahan layanan dalam pembayaran retribusi, sedangkan untuk menarik minat kemauan membayar pajak dengan memberikan *reward* kepada wajib pajak yang taat pajak dan sanksi administratif pada wajib pajak yang tidak taat pajak.

2.3.4 Kinerja Pendapatan Masa Lalu

Kinerja pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari perkembangan PAD Provinsi Jawa Tengah. Berikut target, realisasi dan capaian PAD Provinsi Jawa Tengah pada gambar II.4 serta pertumbuhannya pada gambar II.5 berikut ini.

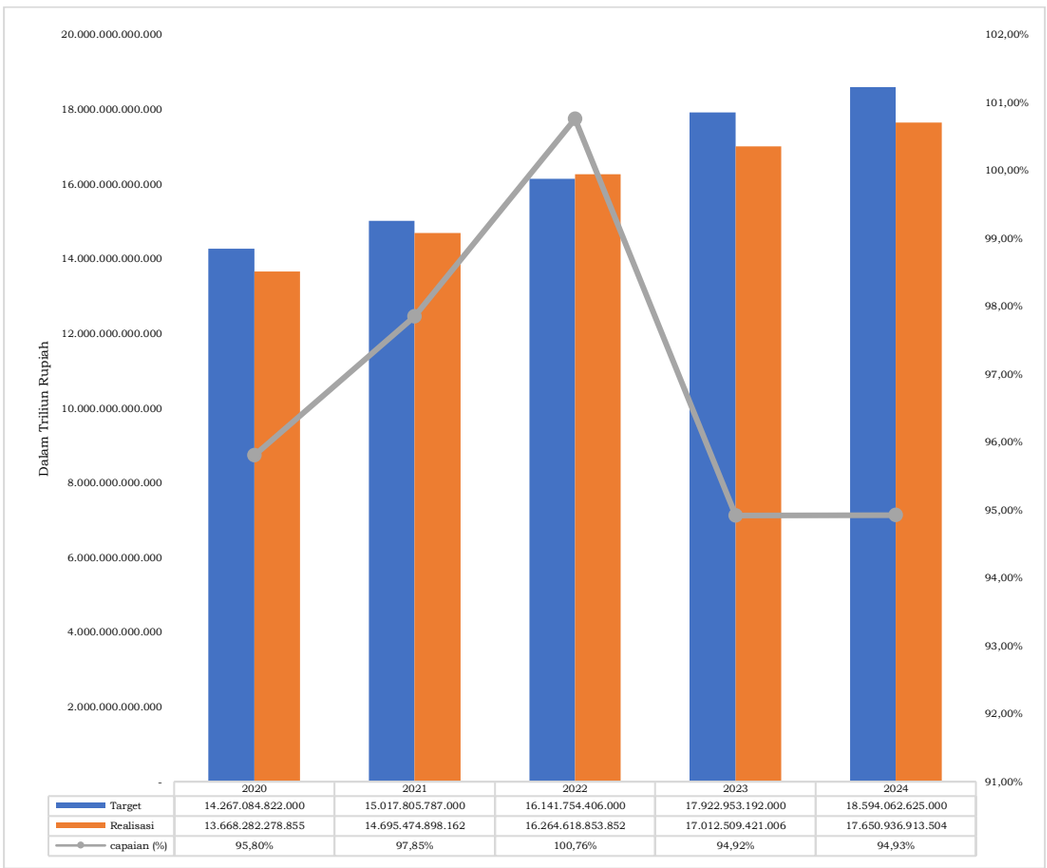

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	14.267.084.822.000	15.017.805.787.000	16.141.754.406.000	17.922.953.192.000	18.594.062.625.000
Realisasi	13.668.282.278.855	14.695.474.898.162	16.264.618.853.852	17.012.509.421.006	17.650.936.913.504
capaian (%)	95,80%	97,85%	100,76%	94,92%	94,93%

Gambar II-4 Target, Realisasi dan Capaian PAD Tahun 2020-2024

Sumber: Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

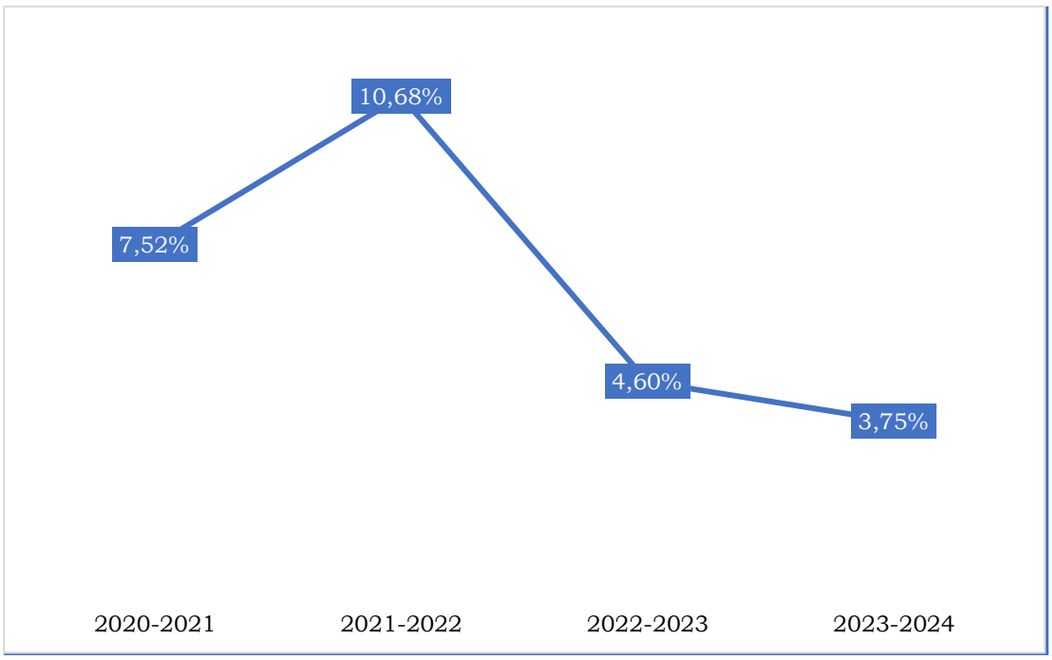

Gambar II-5 Pertumbuhan PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Komponen PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang paling besar memberikan kontribusi yaitu pendapatan Pajak Daerah dengan rata-rata kontribusinya terhadap PAD selama 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel II.8 Proporsi PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Uraian	Jumlah (Rp)					Rata-Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pajak Daerah	81,50%	79,74%	82,91%	82,16%	80,51%	81,36%
Retribusi Daerah	0,68%	0,62%	0,71%	0,82%	13,14%	3,19%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,88%	3,46%	3,36%	3,75%	3,90%	3,67%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	13,94%	16,18%	13,02%	13,27%	2,46%	11,77%

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data diatas, komposisi PAD dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber pendapatan dari Pajak Daerah. Pajak Daerah secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap total PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 81,43%. Persentase tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 82,91%, dan yang terendah pada tahun 2021 sebesar 79,74%.

Sumber pendapatan dari Retribusi Daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2024. Pada tahun-tahun sebelumnya (2020–2023), kontribusinya relatif kecil dan stabil,

berkisar antara 0,62% hingga 0,82%. Namun, pada tahun 2024, terjadi lonjakan besar dengan kontribusi mencapai 12,84%, sehingga mendorong rata-rata kontribusi selama lima tahun menjadi 3,13%.

Kontribusi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercatat cukup stabil selama lima tahun terakhir. Persentasenya berkisar antara 3,36% hingga 3,91%, dengan rata-rata kontribusi sebesar 3,67%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber ini memberikan sumbangan yang cukup konsisten terhadap PAD meskipun tidak terlalu besar.

Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan tren yang cukup fluktuatif. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 16,18%, sementara yang terendah tercatat pada tahun 2024 yaitu hanya 2,42%. Rata-rata kontribusinya selama lima tahun terakhir mencapai 11,77%, menjadikannya komponen kedua terbesar setelah Pajak Daerah.

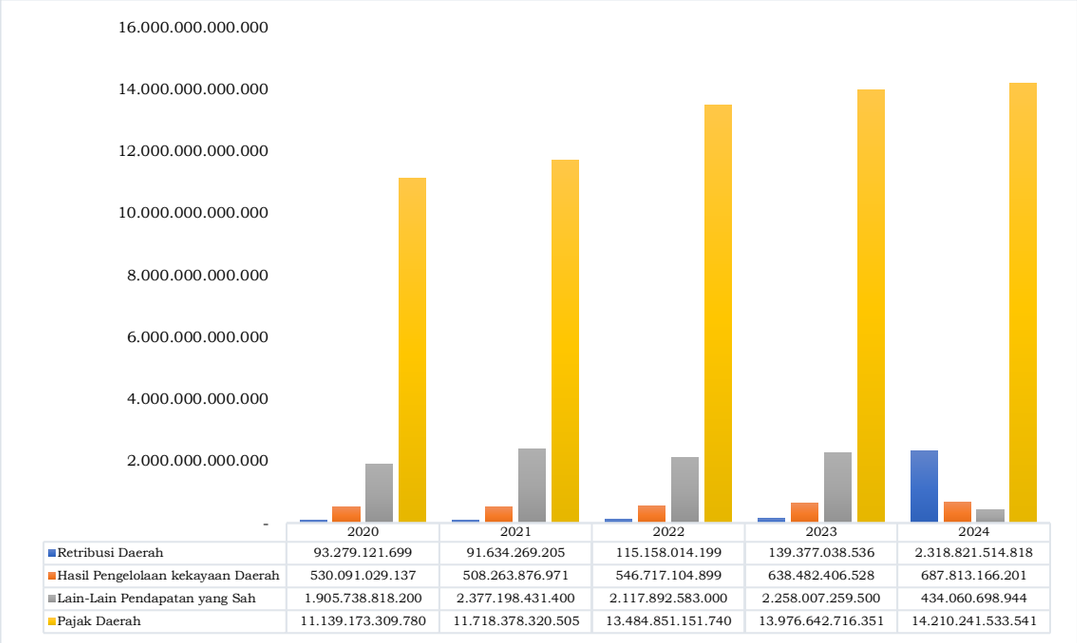

	2020	2021	2022	2023	2024
Retribusi Daerah	93.279.121.699	91.634.269.205	115.158.014.199	139.377.038.536	2.318.821.514.818
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah	530.091.029.137	508.263.876.971	546.717.104.899	638.482.406.528	687.813.166.201
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.905.738.818.200	2.377.198.431.400	2.117.892.583.000	2.258.007.259.500	434.060.698.944
Pajak Daerah	11.139.173.309.780	11.718.378.320.505	13.484.851.151.740	13.976.642.716.351	14.210.241.533.541

Gambar II-6 Perbandingan Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa struktur PAD Provinsi Jawa Tengah masih sangat bergantung pada penerimaan dari Pajak Daerah. Namun, adanya peningkatan pada Retribusi Daerah di tahun 2024 menunjukkan potensi untuk diversifikasi sumber pendapatan daerah yang lebih seimbang di masa depan. Bapenda mengupayakan peningkatan dan optimalisasi dari sumber-sumber pendapatan lain guna mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber utama dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Adapun laju pertumbuhan dari komponen pembentuk PAD di Provinsi Jawa Tengah tersaji dalam gambar dibawah ini:

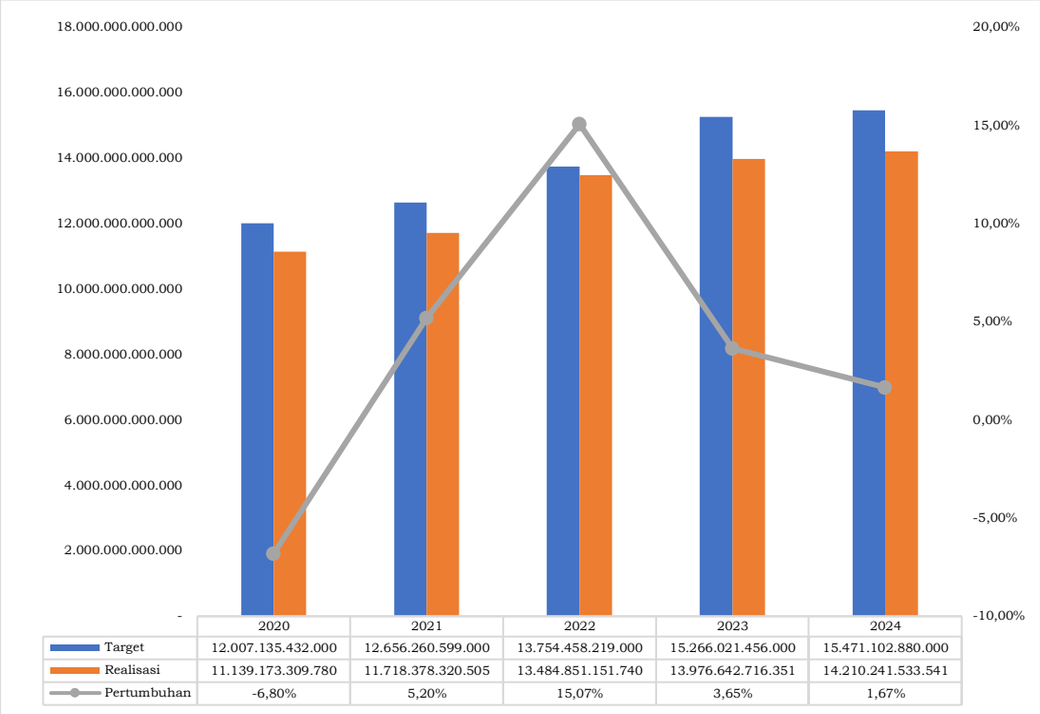

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	12.007.135.432.000	12.656.260.599.000	13.754.458.219.000	15.266.021.456.000	15.471.102.880.000
Realisasi	11.139.173.309.780	11.718.378.320.505	13.484.851.151.740	13.976.642.716.351	14.210.241.533.541
Pertumbuhan	-6,80%	5,20%	15,07%	3,65%	1,67%

Gambar II-7 Target, Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2020-2024

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pajak daerah masih menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi paling besar setiap tahunnya. Pajak merupakan salah satu kunci lancar dan suksesnya program dan kegiatan pembangunan disegala bidang, termasuk untuk melestarikan sumber daya alam agar terus memberi manfaat bagi manusia.

Perkembangan target dan realisasi Retribusi Daerah serta pertumbuhannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

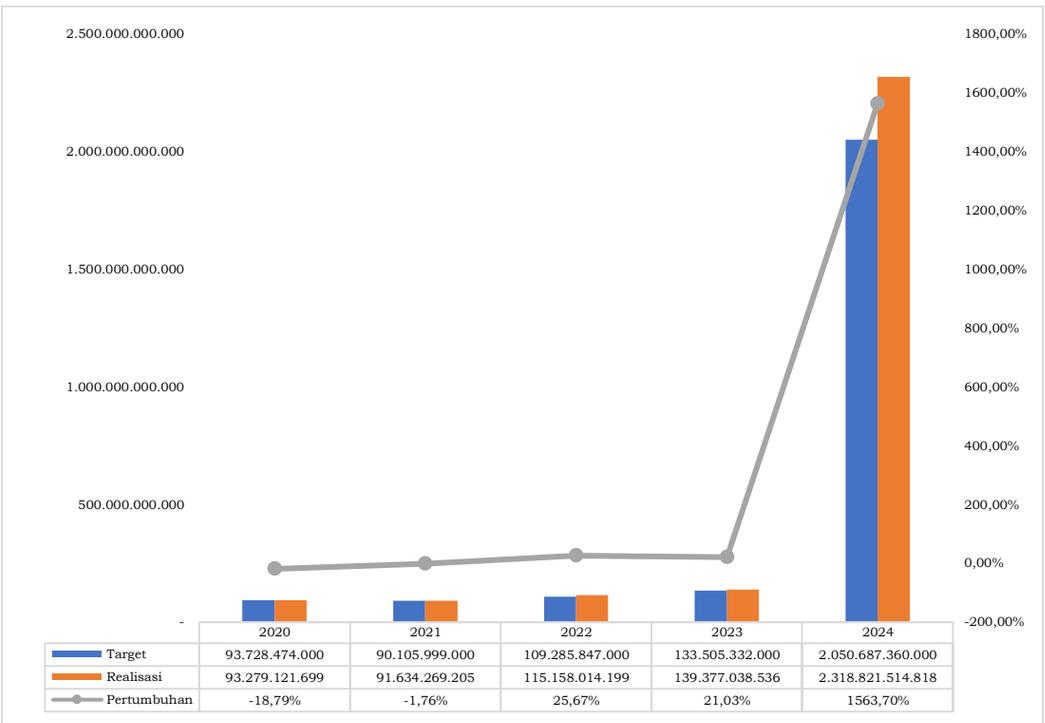

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	93.728.474.000	90.105.999.000	109.285.847.000	133.505.332.000	2.050.687.360.000
Realisasi	93.279.121.699	91.634.269.205	115.158.014.199	139.377.038.536	2.318.821.514.818
Pertumbuhan	-18,79%	-1,76%	25,67%	21,03%	1563,70%

Gambar II-8 Target, Realisasi dan Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2020-2024

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Tren pertumbuhan retribusi di Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi yang signifikan akhir tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan perubahan pos penerimaan pendapatan yang berasal dari BLUD. Pendapatan BLUD tahun 2023 dan sebelumnya masuk kedalam pos lain-lain PAD, sedangkan pada tahun 2024 masuk kedalam retribusi pelayanan kesehatan pada jenis retribusi jasa umum.

Selanjutnya perkembangan target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta pertumbuhannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

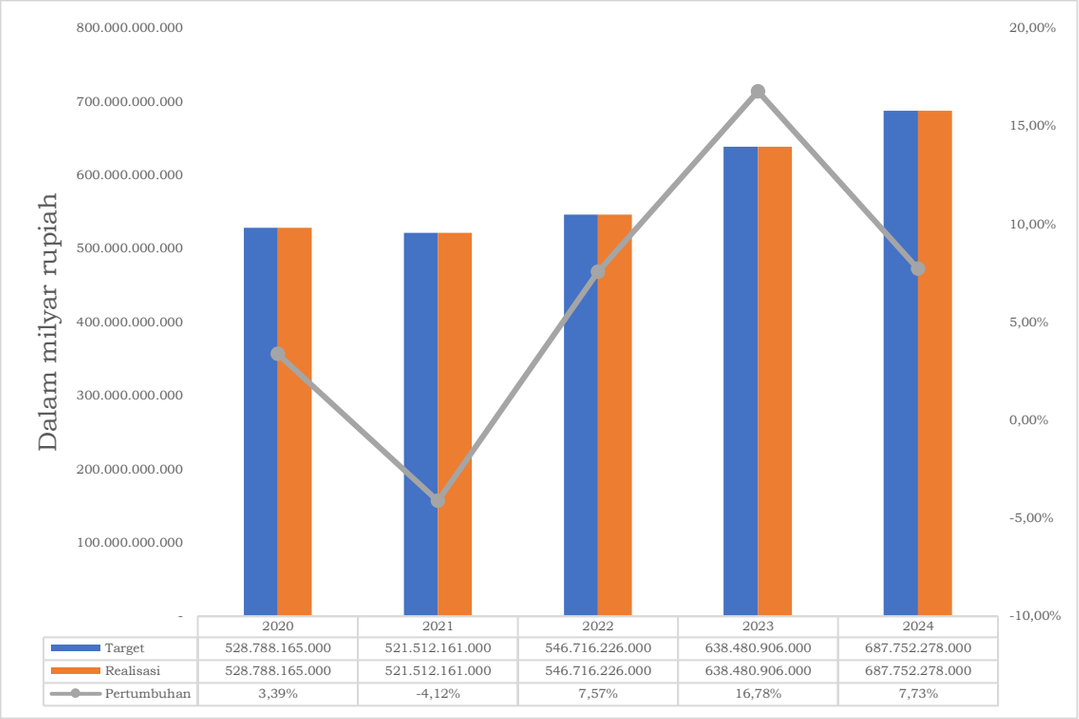

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	528.788.165.000	521.512.161.000	546.716.226.000	638.480.906.000	687.752.278.000
Realisasi	528.788.165.000	521.512.161.000	546.716.226.000	638.480.906.000	687.752.278.000
Pertumbuhan	3,39%	-4,12%	7,57%	16,78%	7,73%

Gambar II-9 Target, Realisasi dan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020- 2024

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Jawa Tengah selama 2020–2024 menunjukkan relatif stabil dengan kecenderungan positif. Penurunan di 2021 disebabkan oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai entitas pengelola kekayaan daerah, baik dari sisi operasional maupun keuntungan. Namun, pemulihan signifikan setelah 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa BUMD berhasil meningkatkan efisiensi usaha, memperluas sektor investasi, serta menyesuaikan strategi bisnis pasca-pandemi. Selain itu, dorongan dari pemerintah daerah melalui penyertaan modal dan perbaikan tata kelola BUMD sesuai dengan amanat Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis BUMD menjadi faktor penting yang mendukung pertumbuhan.

Perkembangan target dan realisasi Lain-lain PAD Provinsi Jawa Tengah serta pertumbuhannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

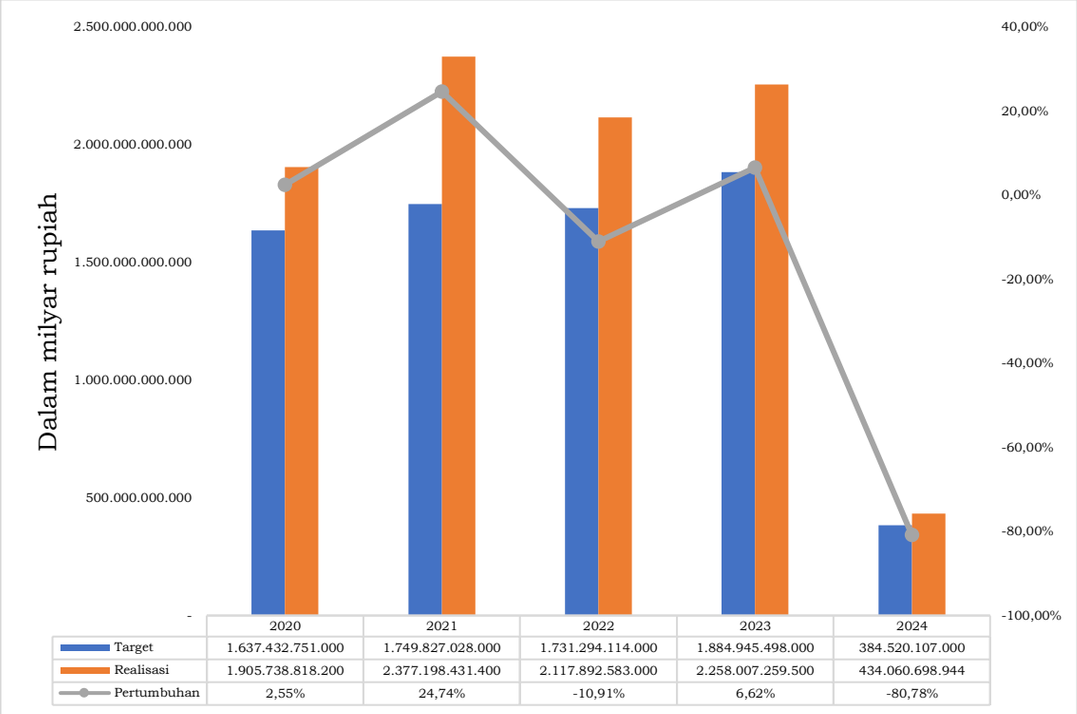

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1.637.432.751.000	1.749.827.028.000	1.731.294.114.000	1.884.945.498.000	384.520.107.000
Realisasi	1.905.738.818.200	2.377.198.431.400	2.117.892.583.000	2.258.007.259.500	434.060.698.944
Pertumbuhan	2,55%	24,74%	-10,91%	6,62%	-80,78%

Gambar II-10 Target, Realisasi dan Pertumbuhan Lain-lain PAD Tahun 2020-2024

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Tren realisasi penerimaan lain-lain PAD menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2024 terjadi perubahan pos penerimaan terkait BLUD. Pendapatan BLUD tahun 2023 dan sebelumnya masuk kedalam pos lain-lain PAD, sedangkan pada tahun 2024 masuk kedalam retribusi pelayanan kesehatan pada jenis retribusi jasa umum.

Berikut merupakan tabel pencapaian pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024. Tabel tersebut mencerminkan capaian kinerja Bapenda Provinsi Jawa Tengah pada periode sebelumnya. Berikut secara data secara detailnya :

Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah 2020 – 2024 (realisasi 2020-2024), 2024 (target)

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%				-5,45	3,56	7,68	4,05		-5,23	7,00	7,75	4,04		95,90	196,63	100,91	99,75	
2	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%				-7,33	5,36	8,68	3,58		-6,80	5,20	8,51	3,45		92,77	97,01	98,04	96,37	
3	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain yg sah	%				2,05	-4,31	2,26	6,79		2,31	17,06	2,65	8,14		112,54	100,00	117,26	119,88	
4	Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah	%				95	95	95	95		95	95	95	95		100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB	%				11,3	8,73	13,81	10,17		0,84	3,92	6,99	1,57		7,43	44,90	50,62	15,44	
6	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB	%				11,6	11,5	6,24	5,38		-34,73	24,57	8,35	1,56		-299,40	213,65	133,81	29,00	
7	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	%				19,96	10,59	10,6	11,85		-3,27	45,1	3,76	2,97		-16,38	425,87	35,47	25,06	
8	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada Dipisahkan	%				14,26	11	11	12,26		3,39	-4,12	8,96	1,91		23,77	-37,45	81,45	15,58	
9	Persentase peningkatan penerimaan PAP	%				15,17	8,4	7,75	8,41		75	7,39	14,46	1,09		494,40	87,98	186,58	12,96	
10	Persentase peningkatan penerimaan PBBKB	%				8,26	7,24	4,98	6,49		0,12	6,24	8,34	0,6		1,45	86,19	167,47	9,24	
11	Persentase peningkatan penerimaan Pajak Rokok	%				7,42	8,64	6,25	12,08		-17,22	6,29	12,14	-13,46		-232,08	72,80	194,24	-111,42	
12	Persentase peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	%				9,98	0,38	2,84	9,54		2,96	23,82	0,1	0,84		29,66	6268,42	3,52	8,81	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
13	Persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah	%				90	90	90	90		-0,107030013	90	100,85	17,36		-0,12	100,00	112,06	19,29	
14	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang I	%				0,71	5,15	8,13	5,95		31,14	-5,93	4,85	0,96		4385,92	-115,15	59,66	16,13	
15	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang I	%				3,67	13,13	7,04	6,03		3,01	24,03	5,28	2,19		82,02	183,02	75,00	36,32	
16	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang I	%				15	11,54	10,34	9,38		90					600,00	0,00	0,00	0,00	
17	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang I	%				10,59	10,59	10,6	10,59		1,09	78	2,68	4,33		10,29	736,54	25,28	40,89	
18	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang II	%				9,65	8,96	14,12	10,34		-27,32	11,45	5,73	1,14		-283,11	127,79	40,58	11,03	
19	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang II	%				4,02	6,98	3,74	3,2		0	24,4	5,1	2,22		0,00	349,57	136,36	69,38	
20	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang II	%				15	11,54	10,34	9,38		-0,816	-3,85	-0,09	0,48		-5,44	-33,36	-0,87	5,12	
21	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang II	%				10,59	10,59	10,6	10,59		-10,57	95,3	3,08	-8,44		-99,81	899,91	29,06	-79,70	
22	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang III	%				1,78	11,18	17,63	12,91		-28,36	-2,22	1,73	1,23		-1593,26	-19,86	9,81	9,53	
23	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang III	%				0,63	11,31	6,07	5,19		0,83	17,27	-1,83	2,51		131,75	152,70	-30,15	48,36	
24	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang III	%				15	11,54	10,34	9,38		0,342	83,52	144,33	1		2,28	723,74	1395,84	10,66	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
25	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang III	%				10,59	10,59	10,6	10,59		-7,23	82,8	6,75	-3,88		-68,27	781,87	63,68	-36,64	
26	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Semarang	%				24,73	9,29	14,65	10,73		-26,04	6,08	-1,46	1,77		-105,30	65,45	-9,97	16,50	
27	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Semarang	%				10,21	13,94	7,48	6,4		15,02	27,23	12,14	2,07		147,11	195,34	162,30	32,34	
28	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Semarang	%				15	11,54	10,34	9,38		-0,01	-4,39	23,5	1,57		-0,07	-38,04	227,27	16,74	
29	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Semarang	%				10,59	10,59	10,6	10,59		0,08	47,7	2,06	-1,32		0,76	450,42	19,43	-12,46	
30	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Salatiga	%				15,06	8,23	12,97	9,5		-31,13	-3,58	-10,31	1,3		-206,71	-43,50	-79,49	13,68	
31	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Salatiga	%				11,66	17,5	17,19	9,22		10,74	31,56	17,12	1,26		92,11	180,34	99,59	13,67	
32	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Salatiga	%				15	11,54	10,34	9,38		0,2	-15,76	4,41	0,13		1,33	-136,57	42,65	1,39	
33	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Salatiga	%				10,59	10,59	10,6	10,59		3,17	17,2	1,13	0,91		29,93	162,42	10,66	8,59	
34	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kendal	%				2,7	9,67	15,24	11,16		-33,75	2,72	16,25	1,7		-1250,00	28,13	106,63	15,23	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
35	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kendal	%				6,87	14,3	7,67	6,56		-0,77	23,17	5,65	2,04		-11,21	162,03	73,66	31,10	
36	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kendal	%				15	11,54	10,34	9,38		0,02	6,37	46,22	1,09		0,13	55,20	447,00	11,62	
37	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kendal	%				10,59	10,59	10,6	10,59		0,08	21	1,05	4,42		0,76	198,30	9,91	41,74	
38	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Demak	%				19,48	12,65	19,94	14,6		-26,66	3,37	7,39	2,24		-136,86	26,64	37,06	15,34	
39	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Demak	%				15,48	13,72	7,35	6,29		-11,88	19,94	6,27	1,56		-76,74	145,34	85,31	24,80	
40	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Demak	%				15	11,54	10,34	9,38		0,16	24,18	26,11	0,18		1,07	209,53	252,51	1,92	
41	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Demak	%				10,59	10,59	10,6	10,59		15,45	12,2	0,88	0,68		145,89	115,20	8,30	6,42	
42	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Grobogan	%				11,02	8088	14	10,25		-32,45	4,38	9,32	1,79		-294,46	0,05	66,57	17,46	
43	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Grobogan	%				6,92	20,32	10,9	9,32		14,89	21,81	8,35	0,7		215,17	107,33	76,61	7,51	
44	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Grobogan	%				15	11,54	10,34	9,38		0,03	29,13	31,8	1,56		0,20	252,43	307,54	16,63	
45	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan	%				10,59	10,59	10,6	10,59		4,57	50,1	3,11	1,53		43,15	473,09	29,34	14,45	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Daerah diUPPD Kabupaten Grobogan																			
46	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Surakarta	%				5,77	8,22	12,95	9,49		-24,65	2,49	-4,23	0,97		-427,21	30,29	-32,66	10,22	
47	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Surakarta	%				3,61	13,5	7,24	6,19		16,04	26,67	8,92	2,34		444,32	197,56	123,20	37,80	
48	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Surakarta	%				15	11,54	10,34	9,38		0,03	-15,16	0,98	0,14		0,20	-131,37	9,48	1,49	
49	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Surakarta	%				10,59	10,59	10,6	10,59		-7,01	32,2	10,28	2		-66,19	304,06	96,98	18,89	
50	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Klaten	%				7,85	9,35	14,73	10,79		-33,14	0,09	7,3	1,32		-422,17	0,96	49,56	12,23	
51	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Klaten	%				6,51	23,44	12,57	10,76		-0,38	22,56	6,99	1,91		-5,84	96,25	55,61	17,75	
52	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Klaten	%				15	11,54	10,34	9,38		0,01	9,93	10,85	-0,43		0,07	86,05	104,93	-4,58	
53	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Klaten	%				10,59	10,59	10,6	10,59		5,32	6,9	9,95	0,16		50,24	65,16	93,87	1,51	
54	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sragen	%				9,31	9,4	14,73	10,79		-25,81	6,8	10,71	1,35		-277,23	72,34	72,71	12,51	
55	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sragen	%				15,37	7,53	4,04	3,45		-1,33	29,15	15,53	1,29		-8,65	387,12	384,41	37,39	
56	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sragen	%				15	11,54	10,34	9,38		0,04	-88,93	-6,11	0		0,27	-770,62	-59,09	0,00	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
57	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sragen	%				10,59	10,59	10,6	10,59		4,26	19,7	9,6	1,61		40,23	186,02	90,57	15,20	
58	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo	%				15,42	8,43	13,3	9,74		-29,55	9,97	18,43	1,18		-191,63	118,27	138,57	12,11	
59	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo	%				10,79	12,52	6,71	5,74		-19,9	29,26	14,45	1,75		-184,43	233,71	215,35	30,49	
60	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sukoharjo	%				15	11,54	10,34	9,38		0,02	-11,05	3,44	-19,06		0,13	-95,75	33,27	-203,20	
61	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sukoharjo	%				10,59	10,59	10,6	10,59		4,91	23,1	2,26	1,73		46,36	218,13	21,32	16,34	
62	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonogiri	%				14,05	9,22	14,54	10,65		-28,66	3,62	0,47	1,27		-203,99	39,26	3,23	11,92	
63	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonogiri	%				12,6	9,59	5,14	4,4		-11,41	25,04	9,61	1,9		-90,56	261,11	186,96	43,18	
64	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Wonogiri	%				15	11,54	10,34	9,38		0,02	-7,1	34,91	1,86		0,13	-61,53	337,62	19,83	
65	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Wonogiri	%				10,59	10,59	10,6	10,59		-26,87	102	1,77	0,56		-253,73	963,17	16,70	5,29	
66	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Karanganyar	%				6,37	6,77	10,68	7,82		14,66	3,6	16,58	1,16		230,14	53,18	155,24	14,83	
67	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di	%				8,25	7,52	4,03	3,45		-0,2	25,56	10,29	1,89		-2,42	339,89	255,33	54,78	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	UPPD Kabupaten Karanganyar																			
68	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Karanganyar	%				15	11,54	10,34	9,38		5,45	19,15	31,88	0,32		36,33	165,94	308,32	3,41	
69	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Karanganyar	%				10,59	10,59	10,6	10,59		1,74	29,5	0,47	2,09		16,43	278,56	4,43	19,74	
70	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Boyolali	%				7,61	10,37	16,34	11,97		-28,14	8,26	15,43	1,52		-369,78	79,65	94,43	12,70	
71	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Boyolali	%				8,22	8,79	4,71	4,03		8,06	28,97	12,87	1,17		98,05	329,58	273,25	29,03	
72	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Boyolali	%				15	11,54	10,34	9,38		-0,03	6,71	15,78	1,26		-0,20	58,15	152,61	13,43	
73	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Boyolali	%				10,59	10,59	10,6	10,59		8,87	17,7	9,08	-7,76		83,76	167,14	85,66	-73,28	
74	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pati	%				13,01	9,22	14,54	10,65		-30,21	3,63	4,33	1,43		-232,21	39,37	29,78	13,43	
75	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pati	%				17,32	13,58	7,28	6,23		11,7	15,88	2,5	1,13		67,55	116,94	34,34	18,14	
76	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pati	%				15	11,54	10,34	9,38		0,3	17,05	21,26	-1,36		2,00	147,75	205,61	-14,50	
77	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pati	%				10,59	10,59	10,6	10,59		-21,37	53,7	-26,7	1,2		-201,79	507,08	-251,89	11,33	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
78	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Blora	%				9,76	10,1	15,92	11,66		7,82	3,17	0,2	1,37		80,12	31,39	1,26	11,75	
79	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Blora	%				11,07	16,92	9,07	7,77		0	11,54	-1,93	2,22		0,00	68,20	-21,28	28,57	
80	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Blora	%				15	11,54	10,3	9,38		6,77	-5,4	36,78	0,16		45,13	-46,79	357,09	1,71	
81	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Blora	%				10,59	10,59	10,6	10,59		4,76	47,3	6,74	2,32		44,95	446,65	63,58	21,91	
82	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Rembang	%				7,19	10,12	15,59	11,68		-18,28	3,63	-1,87	1,75		-254,24	35,87	-11,99	14,98	
83	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Rembang	%				6,4	25,42	13,63	11,66		15,63	27,87	12,02	1,3		244,22	109,64	88,19	11,15	
84	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Rembang	%				15	11,54	10,34	9,38		0,1	-13,64	24,59	0,02		0,67	-118,20	237,81	0,21	
85	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Rembang	%				10,59	10,59	10,6	10,59		2,38	35	1,95	2,21		22,47	330,50	18,40	20,87	
86	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kudus	%				3,68	13,34	21,17	15,5		-26,41	4,38	2,08	1,14		-717,66	32,83	9,83	7,35	
87	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kudus	%				9,97	7,46	4	3,42		9,22	25,99	10,67	0,95		92,48	348,39	266,75	27,78	
88	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kudus	%				15	11,54	10,34	9,38		0,1	-97,89	406,05	-15,73		0,67	-848,27	3926,98	-167,70	
89	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi	%				10,59	10,59	10,6	10,59		1,94	53	1,73	1,6		18,32	500,47	16,32	15,11	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kudus																			
90	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Jepara	%				6,85	8,88	14	10,25		-25,42	8,05	12,69	2,17		-371,09	90,65	90,64	21,17	
91	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Jepara	%				5,86	12,11	6,49	5,56		-29,57	20,42	5,45	0,73		-504,61	168,62	83,98	13,13	
92	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Jepara	%				15	11,54	10,34	9,38		0,87	100	16,45	0,65		5,80	866,55	159,09	6,93	
93	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Jepara	%				10,59	10,59	10,6	10,59		6,24	147,4	1,61	2,17		58,92	1391,88	15,19	20,49	
94	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Pekalongan	%				12,53	10	15,76	11,54		-22,22	4,62	-12,79	1,48		-177,33	46,20	-81,15	12,82	
95	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Pekalongan	%				6,12	11,89	6,38	5,46		0	40,01	22,51	1,59		0,00	336,50	352,82	29,12	
96	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Pekalongan	%				15	11,54	10,34	9,38		0,1					0,67	0,00	0,00	0,00	
97	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Pekalongan	%				10,59	10,59	10,6	10,59		-4,72	20,9	1,31	1,9		-44,57	197,36	12,36	17,94	
98	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pekalongan	%				14,5	11,5	18,14	13,28		-28,54	7,32	25,37	2,21		-196,83	63,65	139,86	16,64	
99	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pekalongan	%				1,51	5,53	2,97	2,54		0	34,39	14,86	0,97		0,00	621,88	500,34	38,19	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
100	Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan	%				15	11,54	10,34	9,38		-0,05	86,07	71,21	0,99		-0,33	745,84	688,68	10,55	
101	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan	%				10,59	10,59	10,6	10,59		0,07	7,5	2,65	3,14		0,66	70,82	25,00	29,65	
102	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Batang	%				7,67	11,6	18,29	13,39		-25,87	6,3	22,43	2,41		-337,29	54,31	122,64	18,00	
103	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Batang	%				2,1	15,32	8,21	7,03		7,63	25,49	4,89	1,81		363,33	166,38	59,56	25,75	
104	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Batang	%				15	11,54	10,34	9,38		0	3,01	57,07	0,05		0,00	26,08	551,93	0,53	
105	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Batang	%				10,59	10,59	10,6	10,59		-0,73	12,9	0	2,4		-6,89	121,81	0,00	22,66	
106	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pemalang	%				8,02	9,95	15,68	11,48		-22,2	6,06	15,71	2,09		-276,81	60,90	100,19	18,21	
107	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pemalang	%				0,75	7,48	4,01	3,43		28,26	18,94	1,01	1,6		3768,00	253,21	25,19	46,65	
108	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pemalang	%				15	11,54	10,34	9,38		0,09	-46,45	13,03	0,81		0,60	-402,51	126,02	8,64	
109	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pemalang	%				10,59	10,59	10,6	10,59		0,73	31	10,1	2,2		6,89	292,73	95,28	20,77	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
110	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Tegal	%				20,45	8,82	13,91	10,19		-24,06	9,91	-13,28	1,74		-117,65	112,36	-95,47	17,08	
111	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Tegal	%				2,53	6,4	3,43	2,94		-1	27,03	5,34	1,71		-39,53	422,34	155,69	58,16	
112	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Tegal	%				15	11,54	10,34	9,38		0,03					0,20	0,00	0,00	0,00	
113	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Tegal	%				10,59	10,59	10,6	10,59		9,79	119,5	9,48	-75,53		92,45	1128,42	89,43	-713,22	
114	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Tegal	%				0,45	12,62	19,9	14,57		-22,5	2,66	30,81	2,31		-5000,00	21,08	154,82	15,85	
115	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Tegal	%				0,18	3,25	1,74	1,49		0	28,04	8,3	1,44		0,00	862,77	477,01	96,64	
116	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Tegal	%				15	11,54	10,34	9,38			-20,31	12,21	1,36		0,00	-176,00	118,09	14,50	
117	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Tegal	%				10,59	10,59	10,6	10,59		-1,69	8,5	1,94	2,47		-15,96	80,26	18,30	23,32	
118	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Brebes	%				9,01	6,99	11,01	8,06		-25,38	-1,64	14,77	2,39		-281,69	-23,46	134,15	29,65	
119	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Brebes	%				3,98	1,01	0,54	0,46		-3,15	21,45	3,91	1,81		-79,15	2123,76	724,07	393,48	
120	Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes	%				15	11,54	10,34	9,38		0	-48,27	4,66	1,39		0,00	-418,28	45,07	14,82	
121	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan	%				10,59	10,59	10,6	10,59		-10,02	2,7	9,27	0,65		-94,62	25,50	87,45	6,14	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Daerah di UPPD Kabupaten Brebes																			
122	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banyumas	%				7,55	6,71	10,57	7,74		-19,01	4,02	11,49	1,7		-251,79	59,91	108,70	21,96	
123	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banyumas	%				8,56	6,64	3,56	3,05		-8,53	27,81	11,11	1,45		-99,65	418,83	312,08	47,54	
124	Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas	%				15	11,54	10,34	9,38		0,09	0,25	9,41	1,31		0,60	2,17	91,01	13,97	
125	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banyumas	%				10,59	10,59	10,6	10,59		-1,01	50,5	0	0,3		-9,54	476,86	0,00	2,83	
126	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Cilacap	%				5,86	7,14	11,26	8,25		-27,91	5,72	10,63	1,74		-476,28	80,11	94,40	21,09	
127	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Cilacap	%				9,83	5,41	2,9	2,48		-1,33	17,47	2,26	1,17		-13,53	322,92	77,93	47,18	
128	Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap	%				15	11,54	10,34	9,38		0,067	28,77	7,73	0,57		0,45	249,31	74,76	6,08	
129	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Cilacap	%				10,59	10,59	10,6	10,59		0,42	14,6	1,44	1,93		3,97	137,87	13,58	18,22	
130	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purbalingga	%				8,04	5,39	8,5	6,23		-22,5	4,29	1,32	1,98		-279,85	79,59	15,53	31,78	
131	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purbalingga	%				1,91	9,91	5,31	4,55		33,15	41,89	24,62	1,65		1735,60	422,70	463,65	36,26	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
132	Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga	%				15	11,54	10,34	9,38		0,019	0,58	74,06	1,2		0,13	5,03	716,25	12,79	
133	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga	%				10,59	10,59	10,6	10,59		-0,53	8,4	1,16	2,01		-5,00	79,32	10,94	18,98	
134	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara	%				7,96	7,56	11,92	8,73		-30,52	5,4	21,24	2,09		-383,42	71,43	178,19	23,94	
135	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara	%				6,04	13,01	6,98	5,97		0,95	31,95	14,8	1,47		15,73	245,58	212,03	24,62	
136	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Banjarnegara	%				15	11,54	10,34	9,38		0,13	3,31	-1,62	1,7		0,87	28,68	-15,67	18,12	
137	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Banjarnegara	%				10,59	10,59	10,6	10,59		2	46,4	0,82	0,6		18,89	438,15	7,74	5,67	
138	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Magelang	%				37,62	5,12	8,07	5,91		-24,35	10,22	18,21	0,72		-64,73	199,61	225,65	12,18	
139	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Magelang	%				0,55	18,75	10,05	8,6		7,35	32,13	12,19	0,7		1336,36	171,36	121,29	8,14	
140	Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang	%				15	11,54	10,34	9,38		0,06	60,26	52,57	-1,57		0,40	522,18	508,41	-16,74	
141	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Magelang	%				10,59	10,59	10,6	10,59		10,24	31,6	7,63	1,75		96,69	298,39	71,98	16,53	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
142	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Magelang	%				13,82	7,48	11,8	8,64		-21,87	0,95	16,06	1,4		-158,25	12,70	136,10	16,20	
143	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Magelang	%				16,1	7,7	4,13	3,53		69,16	26,36	11,05	1,33		429,57	342,34	267,55	37,68	
144	Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang	%				15	11,54	10,34	9,38		-0,01	20,75	24,38	1,81		-0,07	179,81	235,78	19,30	
145	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Magelang	%				10,59	10,59	10,6	10,59		1,71	89	1,73	12,62		16,15	840,42	16,32	119,17	
146	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kebumen	%				4,94	5,84	9,21	6,75		-22,83	6,34	11,27	1,68		-462,15	108,56	122,37	24,89	
147	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kebumen	%				6,34	8,92	4,78	4,09		18,86	26,11	11,27	1,25		297,48	292,71	235,77	30,56	
148	Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen	%				15	11,54	10,34	9,38		0,1	21,93	22,93	2,46		0,67	190,03	221,76	26,23	
149	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Kebumen	%				10,59	10,59	10,6	10,59		1,71	18,3	11,46	1,15		16,15	172,80	108,11	10,86	
150	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purworejo	%				12,04	10	15,77	11,55		-25,23	6,53	-2,38	1,31		-209,55	65,30	-15,09	11,34	
151	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purworejo	%				11,83	17,05	9,14	7,82		-15,38	27,09	12,48	0		-130,01	158,89	136,54	0,00	
152	Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo	%				15	11,54	10,34	9,38		0,08	9,45	11,76	0,37		0,53	81,89	113,73	3,94	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
153	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purworejo	%				10,59	10,59	10,6	10,59		2,67	16,5	6,65	1,13		25,21	155,81	62,74	10,67	
154	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Temanggung	%				11,1	7,24	11,41	8,35		-25,51	-1,59	12,03	1,14		-229,82	-21,96	105,43	13,65	
155	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Temanggung	%				24,1	11,13	5,97	5,11		4,41	26,24	12,93	0,92		18,30	235,76	216,58	18,00	
156	Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung	%				15	11,54	10,34	9,38		0,1	-28,55	5,1	2		0,67	-247,40	49,32	21,32	
157	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Temanggung	%				10,59	10,59	10,6	10,59		2,44	37,5	4,22	7,69		23,04	354,11	39,81	72,62	
158	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonosobo	%				8,39	9,38	14,79	10,83		-19,91	8,78	12,86	1,63		-237,31	93,60	86,95	15,05	
159	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonosobo	%				15,19	15,6	8,37	7,16		1,88	33,96	16,87	1,23		12,38	217,69	201,55	17,18	
160	Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo	%				15	11,54	10,34	9,38		0	5,15	2,92	1,33		0,00	44,63	28,24	14,18	
161	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo	%				10,59	10,59	10,6	10,59		1,85	74	11,02	0,67		17,47	698,77	103,96	6,33	
B	**Renstra PD Tahun 2024-2026**																			
	Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah	%								12,01					11,64					96,92

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%								14,73					13,53					91,85
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%								-1,19					23,72					100,00
	Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	%								100					100					100,00
	Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	%								72					72					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	%								-1,19					23,72					100,00
	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	%								100					100					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	%								27,35					22,87					83,62
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	%								31,3					27,88					89,07
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%								10,07					13,3					132,08
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%								18,26					18,26					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	%								7,11					6,08					85,51

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	%								13,06					11,75					89,97
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	%								13,4					12,39					92,46
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%								16,23					15,94					98,21
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%								17,39					17,39					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	%								23,97					20,53					85,65
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	%								4,45					4,7					105,62
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	%								36,13					36,48					100,97
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%								16,04					17,53					109,29
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%								17,27					12,97					75,10

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	%								8,9					7,5					84,27
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	%								10,26					9,63					93,86
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	%								19,61					14,86					75,78
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%								14,05					21,07					149,96
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%								16,83					16,83					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	%								4,16					3,56					85,58
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	%								17,05					15,36					90,09
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	%								4,64					4,5					96,98
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%								5,18					5,45					105,21

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%								17,44					17,44					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	%								34,49					28,71					83,24
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	%								19,82					19,41					97,93
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	%								30,85					47,41					153,68
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%								4,75					6,92					145,68
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%								17,61					17,61					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	%								22,16					18,09					81,63
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	%								13,29					12,73					95,79
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	%								21,31					19,78					92,82
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi	%								8,17					9,35					114,44

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak																			
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%								17,32					17,32					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%								23,9					20,24					84,69
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%								17,2					16,37					95,17
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	%								27,45					21,19					77,19
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%								12,93					14,96					115,70
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%								17,66					17,66					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	%								4,89					4,16					85,07
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	%								14,49					12,83					88,54

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	%								10,6					10,6					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%								11,07					11,18					100,99
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%								18,23					18,23					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	%								27,08					22,88					84,49
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	%								8,66					7,65					88,34
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	%								11,44					8,3					72,55
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%								7,6					7,78					102,37
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%								17,13					12,02					70,17
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	%								21,95					18,98					86,47
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik	%								0,7					0,7					100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen																			
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	%								-36,35					13,83					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%								6,99					8,38					119,89
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%								18,06					18,93					104,82
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%								25,83					22,43					86,84
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%								8,73					8,16					93,47
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%								-7,17					-8,14					88,08
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%								5,72					5,92					103,50
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%								17,53					17,53					100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%								15,71					13,28					84,53
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%								18,7					15,2					81,28
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri	%								45,71					20,75					45,39
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%								13,22					15,62					118,15
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%								17					17					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%								35,56					31,16					87,63
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%								1,22					1,2					98,36
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	%								17,17					15,07					87,77
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%								18,84					21,65					114,92

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%								17,39					17,39					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%								24,03					20,3					84,48
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%								11,73					10,87					92,67
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	%								34,16					28,98					84,84
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%								6,13					6,39					104,24
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%								17,13					17,13					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	%								20,83					17,77					85,31
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	%								11,81					10,19					86,28
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	%								13,58					11,76					86,60

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%								16,04					16,54					103,12
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%								16,49					16,49					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	%								14,75					12,56					85,15
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	%								12,22					11,77					96,32
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	%								31,9					26,5					83,07
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%								16,43					19,95					121,42
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%								17,11					16,33					95,44
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	%								13,13					11,03					84,01
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	%								16,86					14,1					83,63

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	%								23,69					19,53					82,44
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%								21,22					22,54					106,22
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%								17					17					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	%								18,05					15,7					86,98
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	%								7,6					7,72					101,58
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	%								-36,92					24,41					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%								12,52					14,14					112,94
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%								17,32					13,18					76,10
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	%								23,11					18,99					82,17
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik	%								7,6					8,04					105,79

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara																			
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	%								10,98					6,53					59,47
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%								-38,28					-48,51					78,91
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%								16,61					16,61					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	%								-25,87					-30,21					85,63
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	%								1,1					1,06					96,36
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%								18,98					19,95					105,11
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%								18,02					18,02					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%								41,39					34,06					82,29
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik	%								9,99					10,07					100,80

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan																			
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	%								14,1					13,89					98,51
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%								13,78					15,16					110,01
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%								18,04					18,04					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	%								38,05					30,5					80,16
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	%								7,86					8,01					101,91
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	%								23,25					20,83					89,59
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%								9,37					11,87					126,68
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%								16,97					16,97					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak	%								29,39					24,16					82,20

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang																			
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%								18,9					18,24					96,51
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	%								15,18					17,13					112,85
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%								9,48					12,13					127,95
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%								17,18					17,18					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	%								-25,1					-29,79					84,26
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	%								32,33					27,92					86,36
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%								73,21					26,6					36,33
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%								18,07					18,07					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak	%								65,74					53,64					81,59

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal																			
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	%								29,02					26,75					92,18
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%								6,13					9,36					152,69
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%								17,65					17,65					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	%								27,22					27,4					100,66
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	%								45,7					36,92					80,79
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	%								34,4					30,86					89,71
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	%								32,04					27,59					86,11
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%								8,61					14,47					168,06
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset	%								17,56					12,65					72,04

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	daerah UPPD Kabupaten Brebes																			
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%								24,04					19,7					81,95
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%								14,17					12,7					89,63
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	%								12,29					9,85					80,15
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%								4,69					6,14					130,92
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%								17,5					17,5					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%								23,1					19,09					82,64
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%								16,63					14,65					88,09
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	%								3,69					4					108,40
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi	%								23,45					25,35					108,10

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap																			
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%								17,17					17,17					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%								12,93					10,52					81,36
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%								4,03					3,65					90,57
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	%								23,21					24,24					104,44
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	%								6,97					7,36					105,60
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%								16,79					16,79					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%								42,89					35,2					82,07
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%								9,96					9,08					91,16

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%								6,85					5,48					80,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%								6,97					9,35					134,15
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%								16,5					16,5					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	%								-50,13					-58,34					85,93
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	%								0,85					0,93					109,41
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	%								9,11					8,29					91,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%								21,75					25,96					119,36
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%								17,98					17,98					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	%								41,84					36,25					86,64

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	%								15,28					13,72					89,79
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	%								30,31					27,86					91,92
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%								6,19					8,31					134,25
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%								16,93					16,93					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%								28,97					24,56					84,78
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%								17,84					15,93					89,29
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	%								25,16					16,5					65,58
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%								16,23					20,76					127,91
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset	%								17,45					17,45					100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	daerah UPPD Kabupaten Kebumen																			
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%								10,1					8,73					86,44
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%								17,3					14,41					83,29
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	%								10,44					10,14					97,13
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%								24,54					41,4					168,70
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%								17,86					17,86					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%								37					31,55					85,27
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%								12,14					11,32					93,25
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	%								30,52					25,84					84,67

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%								13,03					18,85					144,67
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%								17,6					17,6					100,00
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%								26,59					22,58					84,92
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%								0,38					0,39					102,63
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	%								21,41					17,27					80,66
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%								0,74					0,78					105,41
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%								17,7					17,7					100,00

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan tabel 10.9 kinerja pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, khususnya dalam pencapaian indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data capaian, rasio peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 hingga 2023 relatif fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian 95,90% akibat adanya tekanan pandemi COVID-19 yang berimbas pada perlambatan ekonomi daerah. Namun demikian, pada tahun 2021, terjadi lonjakan capaian hingga 196,68%, sebuah peningkatan yang mencerminkan keberhasilan optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta dukungan pemulihan ekonomi.

Capaian tahun 2022 mencapai 100,91%, yang menunjukkan keberhasilan mempertahankan target pada level optimal. Akan tetapi, pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian menjadi 99,75%, meskipun masih mendekati target, kondisi ini menandakan adanya keterbatasan daya dorong pertumbuhan PAD dari sektor-sektor utama.

Memasuki tahun 2024, indikator kinerja program dalam Renstra 2024–2026 mengalami perubahan. Jika pada periode sebelumnya (2019–2023) indikator yang digunakan adalah persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka pada periode terbaru bergeser menjadi persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sekaligus menegaskan adanya pergeseran fokus pengukuran kinerja dari sekadar kenaikan absolut menuju keberlanjutan pertumbuhan tahunan. Capaian tahun 2024 sendiri tercatat sebesar 96,92%, yang mengindikasikan tantangan lebih besar dalam menjaga konsistensi pertumbuhan PAD di tengah kompleksitas perekonomian daerah.

Keberhasilan capaian kinerja Bapenda didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Optimalisasi sistem digitalisasi layanan pajak, retribusi dan pendapatan lain. (e-Samsat, pembayaran online, dan inovasi pelayanan lainnya).
2. Sinergi yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota.
3. Pemulihan ekonomi pasca pandemi, yang meningkatkan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi.

Sementara itu, faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan kinerja meliputi:

1. Keterbatasan basis wajib pajak baru, sehingga pertumbuhan PAD lebih mengandalkan potensi eksisting.
2. Kepatuhan pajak yang masih perlu ditingkatkan, khususnya pada sektor kendaraan bermotor dan retribusi daerah.
3. Kondisi eksternal ekonomi, seperti inflasi dan perlambatan daya beli, yang berdampak pada penerimaan pajak daerah.

Dari kinerja periode sebelumnya, terlihat adanya potensi besar dalam perluasan basis penerimaan pajak daerah, baik dari sektor kendaraan bermotor, pajak air permukaan, maupun retribusi pemanfaatan aset daerah. Digitalisasi layanan juga membuka peluang percepatan pelayanan sekaligus peningkatan

transparansi. Namun, permasalahan yang masih perlu dihadapi adalah belum optimalnya penanganan piutang pajak, keterbatasan data integratif antar perangkat daerah, serta resistensi sebagian wajib pajak terhadap sistem pembayaran non-tunai.

Perubahan yang signifikan juga terlihat dalam Renstra 2024–2026, di mana jumlah indikator kinerja program meningkat dari 161 indikator pada Renstra 2019–2023 menjadi 193 indikator. Penambahan ini mencakup indikator baru, yaitu Persentase penanganan piutang pajak daerah sebagai upaya memperkuat manajemen penerimaan dan menekan tunggakan.

Perubahan ini mencerminkan strategi Bapenda yang semakin terukur, komprehensif, dan adaptif terhadap tantangan pengelolaan PAD, serta menunjukkan komitmen dalam memperbaiki kelemahan pada periode sebelumnya melalui penguatan pengendalian piutang dan retribusi.

Selain berdasarkan indikator kinerja sasaran, capaian pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah juga diukur berdasarkan realisasi anggaran/ pendanaan, khususnya pada pendapatan dan belanja. Capaian kinerja anggaran Bapenda Provinsi Jawa Tengah pada periode Renstra sebelumnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp. 000)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Pendapatan	15.414.716.099	16.694.845.739	18.076.881.237	19.676.685.222	18.159.598.504	14.267.084.822	15.017.805.787	16.141.754.406	17.922.953.192	18.594.062.625
2.	Belanja	262.026.768	284.033.155	309.948.512	338.554.735	359.227.179	270.955.855	243.452.000	285.742.195	317.951.249	295.354.247
3.	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Realisasi Anggaran Tahun (Rp.000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Pendapatan	13.668.282.278	14.695.475.083	16.264.618.853	17.012.509.421	17.650.936.913	95,80	97,85	100,76	94,92	94,93	6,07	5,83
2.	Belanja	243.747.357	221.956.907	263.041.723	288.525.386	271.181.542	89,96	91,17	92,06	90,75	91,82	1,80	2,25
3.	Pembiayaan	-	-	-	-	-							

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan Tabel II.10, dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, pengelolaan pendanaan pelayanan di Bapenda Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang relatif stabil meskipun menghadapi dinamika ekonomi yang cukup signifikan. Dari sisi pendapatan daerah, target anggaran APBD terus meningkat dari Rp14,267 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp18,594 triliun pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,07%. Realisasi pendapatan juga tumbuh dengan rata-rata 5,83% , meskipun capaian persentase realisasi terhadap target bervariasi. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan mencapai Rp13,668 triliun atau 95,80% dari target, kemudian meningkat pada tahun 2022 dengan realisasi Rp16,264 triliun atau 100,76% dari target. Namun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan capaian menjadi 94,92%, sebelum kembali stabil di angka 96,89% pada 2024.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, anggaran menunjukkan kenaikan dari Rp270,955 miliar pada 2020 menjadi Rp295,354 miliar pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,83%. Realisasi belanja juga tumbuh dengan rata-rata 2,25%. Pada tahun 2020 realisasi belanja sebesar Rp243,747 miliar atau 89,96% dari target, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 100% dari target, sebelum kembali menurun di tahun 2024 dengan capaian 91,82%.

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian kinerja pengelolaan pendanaan Bapenda antara lain:

a. Kondisi Ekonomi Makro.
   Fluktuasi ekonomi nasional dan global, termasuk dampak pandemi Covid-19 (2020–2021) dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan kepatuhan pajak dan retribusi daerah.
b. Kebijakan Fiskal dan Regulasi.
   Perubahan kebijakan, penyesuaian tarif, serta regulasi pusat maupun daerah berdampak pada kapasitas fiskal dan ruang gerak belanja pemerintah daerah.
c. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi.
   Keberhasilan realisasi pendapatan sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, termasuk efektivitas inovasi layanan pembayaran.
d. Efisiensi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran.
   Belanja yang tidak selalu terserap penuh mencerminkan adanya kendala pada proses perencanaan, pengadaan, atau penyesuaian prioritas kegiatan.
e. Kapasitas Kelembagaan dan Teknologi.
   Kinerja pengelolaan pendanaan juga ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta efektivitas koordinasi antar perangkat daerah.
f. Dinamika Sosial dan Politik.
   Faktor sosial, politik, dan stabilitas daerah turut memengaruhi realisasi anggaran, terutama terkait alokasi dan prioritas program yang harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

2.4 Permasalahan Pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Identifikasi permasalahan dimulai dari tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Bapenda melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pendapatan. Pada lampiran Panduan Penyusunan Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 Bapenda Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi yang sangat vital yaitu berkaitan dengan "Otonomi Fiskal Daerah". Otonomi fiskal daerah yang berarti memanfaatkan potensi fiskal daerah melalui pajak, retribusi, dan pendapatan lain akan meningkatkan PAD. PAD Provinsi Jawa Tengah diharapkan terus meningkat dengan mengoptimalkan beberapa kegiatan dan aktivitas peningkatan. Proses peningkatan PAD membutuhkan *effort* dari berbagai pihak terkait, karena dalam prosesnya tidak terlepas dari berbagai permasalahan.

Bapenda Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat otonomi fiskal daerah memiliki tugas untuk dapat mengidentifikasi permasalahan, dan juga melakukan analisis faktor-faktor untuk menjadi solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut penting karena sangat mempengaruhi aktivitas Bapenda Jawa Tengah agar mencapai target kinerja dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses identifikasi permasalahan dapat dimulai dari sumber permasalahan tersebut yang dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Permasalahan internal yang berarti berasal dari Bapenda itu sendiri termasuk kebijakan yang diambil, model SOTK, Sistem informasi yang digunakan, sarana dan prasarana, serta bentuk pengendalian dan evaluasinya. Berikutnya permasalahan eksternal Bapenda, seperti kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak, serta permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait kepatuhan yang menyebabkan tingginya nilai piutang daerah.

Permasalahan juga menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (gap) antara aktivitas kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Rumusan permasalahan dapat diperoleh salah satunya dari hasil identifikasi pada data kesenjangan (gap), yaitu antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Rumusan tersebut kemudian di petakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Rumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah. Rumusan masalah merupakan penyebab masalah pokok yang lebih spesifik. Sedangkan rumusan akar masalah merupakan sebab dari masalah yang lebih rinci dan detail. Berikutnya berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Bapenda Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel II.11 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya PAD	Belum Optimalnya perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Perencanaan masih berbasis tren historis, belum sepenuhnya menggunakan analisis potensi riil dan proyeksi ekonomi daerah.
			Keterbatasan kajian kebijakan berbasis data dan analisis empiris dalam mendukung penyusunan peraturan daerah pajak dan retribusi.
		Belum Optimalnya Pendataan dan Pendaftaran, Penagihan dan Penyelesaian keberatan pajak daerah	Keterbatasan SDM lapangan dalam melakukan verifikasi dan validasi objek pajak.
			Rendahnya kepatuhan wajib pajak karna sosialisasi dan pengawasan yang belum optimal.
			Keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur keberatan pajak.
		Belum Optimalnya tata kelola, penilaian dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam mendukung pendapatan retribusi daerah	Terdapat mekanisme perhitungan tarif retribusi yang belum berbasis biaya dan manfaat.
			Basis data inventaris BMD belum lengkap, mutakhir, dan terintegrasi.
			Proses penilaian sering bersifat administratif, belum menjadi dasar strategis perencanaan pemanfaatan aset.
			Skema kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga belum maksimal.
		Belum Optimalnya Pengendalian, Evaluasi Tata Kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Keterbatasan data wajib pajak yang valid, terintegrasi, dan diperbarui secara berkala.
			Kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan dan pengendalian
		Belum optimalnya pengelolaan basis data, digitalisasi pelayanan serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah	Keterbatasan integrasi data dan kapasitas pengelolaan basis data pajak dan retribusi daerah.
			Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran dan pelayanan.
			Keterbatasan infrastruktur, sarana, dan prasarana pendukung pengelolaan PAD.

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Hasil Analisis 2025

2.5 Isu Strategis Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian krusial dalam penyusunan rencana pembangunan daerah karena berdampak signifikan di masa depan. Isu strategis bisa menjadi masalah atau peluang, sehingga penting memperhatikan dampaknya terhadap perangkat daerah. Permasalahan dan isu strategis ini menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah. Oleh karena itu, penentuan isu strategis bagi Bapenda Provinsi Jawa Tengah harus mempertimbangkan faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

2.5.1 Permasalahan Bapenda

Bapenda Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi berbagai kendala dalam optimalisasi fungsi dan pelayanan pengelolaan pendapatan daerah. Permasalahan-permasalahan dari hasil analisis gambaran pelayanan Bapenda sebagai berikut:

Pertama, belum optimalnya **perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah**. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dan belum optimalnya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

Kedua, belum optimalnya **Pendataan dan Pendaftaran, Penagihan dan Penyelesaian keberatan pajak daerah** yang berdampak pada **tingkat penerimaan yang rendah**. akar masalah yang mendasari kondisi ini adalah belum optimalnya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dan belum optimalnya Penagihan Pajak Daerah serta belum optimalnya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

Ketiga, belum optimalnya **tata kelola, penilaian dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam mendukung pendapatan retribusi daerah**. Hal ini disebabkan karena Belum Optimalnya Tata kelola Retribusi Daerah, belum optimalnya Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah serta belum optimalnya Pemanfaatan barang Milik daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan retribusi daerah.

Keempat, belum optimalnya **Pengendalian, Evaluasi Tata Kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.** Hal ini disebabkan karena Belum Optimalnya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah serta Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kelima, terdapat kelemahan pada aspek sistem informasi dan sarana prasarana yaitu belum optimalnya **pengelolaan basis data, digitalisasi pelayanan serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah**. Masih belum optimalnya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, belum optimalnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta belum optimalnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.

2.5.2 Isu Strategis Lingkungan Dinamis

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, Bapenda Provinsi Jawa Tengah secara aktif merespons berbagai dinamika yang terjadi di lingkungan strategis, baik pada level global, nasional, maupun regional. Perubahan regulasi, perkembangan teknologi informasi, pertumbuhan ekonomi, serta dinamika sosial masyarakat merupakan faktor-faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi capaian kinerja pengelolaan pendapatan daerah.

Oleh karena itu, identifikasi isu strategis dalam konteks lingkungan dinamis menjadi dasar penting bagi Bapenda dalam menyusun arah kebijakan dan program prioritas ke depan. Pemahaman terhadap isu-isu strategis ini akan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjawab tantangan serta menangkap peluang guna meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Implikasi KLHS bagi pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Bapenda Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki korelasi dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu tentu tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Bapenda Daerah Provinsi Jawa Tengah senantiasa memperhatikan KLHS yang perlu dilakukan, hal tersebut agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat optimal. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 0007/0001565 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang melihat *Logframe* pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 dimana fungsi Bapenda Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan otonomi fiskal daerah dan menjadi bagian dari “Jateng Sigap” yang akan mempengaruhi “Jateng Makmur” dimana salah satu indikatornya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Hal tersebut membuat fungsi Bapenda Provinsi Jawa Tengah memiliki korelasi signifikan dengan KLHS. Secara detail hubungan antara Bapenda Provinsi Jawa Tengah dengan KLHS adalah terkait dengan Pajak Air Permukaan (PAP).

Pertama, pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 – 2043 muncul isu strategis terkait dengan **menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air**. Potensi sumber daya air permukaan terganggu oleh meningkatnya polutan masuk ke badan air yang bersumber dari kegiatan rumah tangga, industri, dan pertanian. Selain itu dari sumber kegiatan domestik juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas sumber daya air akibat tidak terkelolanya air limbah domestik dan juga sampah. Hal tersebut berpotensi menurunkan penerimaan pendapatan Pajak Air Permukaan yang diakibatkan dari tidak optimalnya penggunaan air permukaan sebagai sumber daya air masyarakat.

2.5.3 Potensi daerah yang menjadi kewenangan Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah

Badan Pengelola Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif dan akuntabel. Melalui perannya, Bapenda tidak hanya berfokus pada optimalisasi penerimaan, tetapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan transparan, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk dalam PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, hal-hal mengenai PKB antara lain:

- Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kecuali Kereta api, Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan Lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah, Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat

kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

- Tarif PKB ditetapkan sebesar :
  1) Tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama ditetapkan sebesar 1,05 % (satu koma nol lima persen), ditambah 66% untuk opsen PKB;
  2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen), ditambah 66% untuk opsen PKB;
- Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas, roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif. Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  (a) kepemilikan kedua sebesar 1,4 % (satu koma empat persen) ditambah 66% untuk opsen PKB;
  (b) kepemilikan ketiga sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) ditambah 66% untuk opsen PKB;
  (c) kepemilikan keempat sebesar 2,10 % (dua koma satu persen) ditambah 66% untuk opsen PKB;
  (d) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,45 % (dua koma empat lima persen).

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha, hal-hal mengenai BBNKB antara lain:

1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
3) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
4) Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang mengatur mengenai nilai jual Kendaraan Bermotor

5) Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditambah dengan 66% untuk opsen BBNKB.

c. Pajak Alat Berat (PAB)

Pajak Alat Berat adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat, hal-hal mengenai PAB antara lain:

1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
2) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
3) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
4) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
5) Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat, hal-hal mengenai PBBKB antara lain:

1) Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.
2) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
3) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
4) Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.
5) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi
6) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB. Penyedia BBKB adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

e. Pajak Air Pemukaan (PAP)

Pajak Air Pemukaan adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, hal-hal mengenai PAP antara lain:

1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan untuk keperluan: rumah tangga; pengairan pertanian dan perkebunan rakyat; kehutanan rakyat; perikanan rakyat; sosial dan keagamaan; kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); instansi pemerintah; dan pemadam kebakaran.

2) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
3) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
4) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan. Nilai perolehan Air Permukaan adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
5) Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
6) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk : keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, keperluan keagamaan, kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau), instansi pemerintah, pemadam kebakaran, dan perkebunan dan kehutanan rakyat)

f. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah, hal-hal mengenai Pajak Rokok antara lain:

- Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- Wajib pungut Pajak Rokok adalah instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai.
- Dasar pengenaan Pajak Rokok merupakan cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
- Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari cukai rokok.

g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB Terutang
2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB
3) Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari besaran Pajak Terutang.
4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB dengan tarif Opsen Pajak MBLB.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi terdiri atas Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan kebersihan.

1) Pelayanan Kesehatan merupakan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah, Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
2) Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah dan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. Dikecualikan dari pelayanan kebersihan meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, Jenis objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

1) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha merupakan penyediaantempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2) Retribusi Tempat Pelelangan merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, termasuk penyediaan tempat pelelangan yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;

3) Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
4) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
5) Retribusi Jasa Kepelabuhanan merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
6) Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah;
8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi penggunaan tenaga kerja asing dan pengelolaan pertambangan rakyat.

1) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
2) Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di

bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan Modal Daerah pada BUMN dan/atau BUMD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari :

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga, antara lain:

   1) PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma;
   2) PT. Asuransi Bangun Askrida.

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD antara lain:

   1) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
   2) Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jawa Tengah Petro Energi;
   3) Perusahaan Perseroan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
   4) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;

5) Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah;
6) Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari;
7) Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
8) Perusahaan Perseroan Daerah PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Perseroda;
9) Perusahaan Perseroan Daerah PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Perseroda.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah diantaranya bersumber dari:

a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
b. Pendapatan dari Jasa Giro;
c. Pendapatan dari Bunga Deposito;
d. Pendapatan dari Denda Pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Penerimaan Komisi, Potongan, dan Bentuk Lain;
f. Hasil Kerjasama Daerah.
g. Lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumusan rencana pembangunan daerah dimulai dari proses analisa isu strategis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis dapat berpotensi menjadi masalah maupun peluang dimasa datang, karenanya dalam penentuan isu strategis perlu diperhatikan dampaknya bagi Perangkat Daerah

dimasa datang. Hal tersebut penting dilakukan agar dalam proses analisas isu strategis dapat dengan tepat untuk mencapai tujuan yaitu **"Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan".** Permasalahan dan Isu strategis perangkat daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah di masa datang. Sehingga dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Jawa Tengah tidak dapat terlepas dari lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Beberapa dinamika lingkungan eksternal yang menjadi tantangan terhadap pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, antara lain :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang dikutip pada website www.pajak.go.id terdapat insentif yang diberikan pemerintah kepada konsumen akhir. Insentif konsumen KBL dibagi menjadi dua, yaitu bersifat fiskal dan nonfiskal. **Beberapa kebijakan nonfiskal adalah penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan subsidi pembelian mobil listrik**. Kondisi eksisting saat ini Penjualan Mobil Listrik Indonesia pada tahun 2025 Naik 211% berdasarkan data. goodstats.id. Hal tersebut mengindikasi kendaraan listrik terutama roda empat yang mulai diminati oleh masyarakat. Hal tersebut berpotensi mempengaruhi kondisi penerimaan PKB.
2. Kondisi perekonomian nasional dan global yang tidak menentu dan dapat mengakibatkan **fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan** di Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, hingga Selasa, 20 Mei 2025, total kasus PHK telah mencapai 26.455 kasus secara nasional. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi adalah Jawa Tengah sebanyak 10.695 kasus. Artikel lainnya yang dikutip pada insight.kontan.co.id kondisi tersebut akan berpotensi membuat penerimaan pajak menurun. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menjadi lebih selektif dalam menggunakan uangnya. Berdasarkan dari hal tersebut, berpotensi menurunkan kemampuan dan kemauan masyarakat Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
3. **Tantangan Transformasi Digital (*Digital Platform Disruption*),** digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi memberikan peluang dan tantangan dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Eksistensi teknologi informasi seharusnya dapat membantu otoritas pajak dalam menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien dan efektif dengan pelayanan yang lebih baik dan

memberikan kemudahan layanan pembayaran pajak, retribusi, maupun pendapatan lain. Hal tersebut di dukung oleh Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sekitar 79,5% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Hal ini juga sejalan dengan amanat kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang bertujuan mendukung transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel II.12 Perumusan Isu Strategis Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Bapenda Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Bapenda Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
• Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Lain-Lain PAD Yang Sah	• Belum Optimalnya perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah • Belum Optimalnya Pendataan dan Pendaftaran, Penagihan dan Penyelesaian keberatan pajak daerah • Belum Optimalnya tata kelola, penilaian dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam mendukung pendapatan retribusi daerah • Belum Optimalnya Pengendalian, Evaluasi Tata Kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Belum optimalnya pengelolaan basis data, digitalisasi pelayanan serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah	• Bapenda Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi untuk meningkatkan otonomi fiskal daerah dalam rangka mendukung “Jateng Sigap” menuju “Jateng Makmur”, yang salah satu indikatornya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • Proses pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan memiliki korelasi dengan penerimaan pendapatan melalui Pajak Air Permukaan (PAP)	• Tantangan Transformasi Digital (*Digital Platform Disruption*), digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi memberikan peluang dan tantangan dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah	• Berdasarkan PMK Nomor 38 Tahun 2023 terdapat insentif yang diberikan pemerintah kepada konsumen akhir. Hal ini mendorong pembelian kendaraan listrik, yang meningkatkan minat masyarakat dan berpotensi menurunkan penerimaan dari Pajak. • Semakin turunnya kepercayaan masyarakat luas terhadap pengelolaan keuangan negara maupun daerah dikarenakan tingginya kasus korupsi yang terkuak. Oleh karenanya membuat masyarakat semakin “skeptis” terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran negara pusat dan daerah yang 80% berasal dari pajak.	• Adanya kasus PHK di Provinsi Jawa Tengah berpotensi menurunkan kemampuan dan kemauan masyarakat Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah	• Belum Optimalnya PAD • Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Dinamis

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Hasil Analisis 2025

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bapenda
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bapenda Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok untuk Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Hal tersebut penting mengingat Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 0007/0001565 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Setiap kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis yang memiliki tujuan "**Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan**" yang ditunjukkan dengan **angka kemiskinan menurun, PDRB per kapita meningkat, dan indeks reformasi birokrasi yang semakin membaik**, dengan sasaran meliputi:

a) Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis;
b) Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan;
c) Terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter

Maka, tujuan dalam Renstra Bapenda merupakan penjabaran dari pernyataan arah tujuan yang akan di capai dalam jangka waktu 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap penting untuk menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rekomendasi penyelesaian masalah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan komposisi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Jawa Tengah

3.1.1 Tujuan Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Bapenda Provinsi Jawa Tengah menyusun berbagai macam tujuan yang dapat diimplementasikan, termasuk terkait periode waktu. Secara definisi tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan dapat digunakan sebagai dasar menyusun pilihan strategi Perangkat Daerah dan untuk mengevaluasi pilihan tersebut karenanya selain mendasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rumusan tujuan perlu memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah. Maka, **tujuan utama** Bapenda Provinsi Jawa Tengah adalah **“Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah yang Berintegritas dan Dinamis” untuk memperkuat otonomi fiskal daerah demi Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan**.

Indikator yang digunakan pada Bapenda Provinsi Jawa Tengah, merujuk pada 2 Indikator Keberhasilan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pertama pada bagian ”Indeks Reformasi Birokrasi”, maka Bapenda Provinsi Jawa Tengah terkait dengan program taktis yaitu ”Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Prima”. Hal tersebut dapat dilakukan dengan terus memperbaiki layanan baik dari sisi metode pelayanan, Sumber Daya Manusia terkait jumlah dan kualitasnya,

dan juga sarana prasarana yang mendukung pelayanan. Maka, diperlukan beberapa hal, pertama adalah metode pelayanan SAMSAT untuk ”Jemput Bola” dan menggunakan metode online yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Berikutnya adalah melakuakan penambahan sarana dan prasarana, serta peremajaan aset yang saat ini ada dalam unit layanan SAMSAT. Kedua hal tersebut akan mempercepat peningkatan pelayanan dan fasilitas yang ada di SAMSAT, sehingga pelayanan prima dapat segera terealisasikan dan tujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dapat tercapai.

Kedua, pada bagian ”Otonomi Fiskal Daerah” dengan lebih spesifik pelaksanaan program taktis yaitu ”Perbaikkan tata kelola SAMSAT untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah”. Pada indikator yang kedua ini, merujuk pada penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola Bapenda Provinsi Jawa Tengah yang harus terbagi menjadi dua, yaitu perbaikan dari sisi manajemen dan lembaga. Perbaikkan dari sisi manajemen adalah dengan penyusunan indikator kinerja yang jelas untuk mempermudah penilaian atas kinerja.

Berikutnya untuk dapat melihat bagaimana potensi peningkatan PAD, maka dapat dilihat proyeksi PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1 Proyeksi PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Asli Daerah	**15.542.692.866.000**	**16.112.398.370.000**	**17.129.686.550.000**	**18.242.821.585.000**	**19.380.071.300.000**	**20.537.003.178.000**
Pajak Daerah	**12.650.725.636.000**	**12.899.838.185.000**	**13.709.894.727.000**	**14.571.721.831.000**	**15.486.898.222.000**	**16.457.344.657.000**
1. Pajak Kendaraan Bermotor	4.353.358.423.000	4.240.949.237.000	4.454.453.914.000	4.678.357.254.000	4.911.826.081.000	5.154.381.711.000
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.549.433.805.000	2.476.151.851.000	2.574.565.338.000	2.673.477.283.000	2.771.896.245.000	2.868.531.244.000
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.619.000.000.000	2.786.771.413.000	2.981.845.411.000	3.190.574.589.000	3.413.914.810.000	3.652.888.846.000
4. Pajak Air Permukaan	18.900.000.000	19.845.000.000	20,837.250.000	21.879.112.000	22.973.067.000	24.121.720.000
5. Pajak Rokok	3.088.000.000.000	3.353.865.339.000	3.655.713.219.000	3.984.727.408.000	4.343.352.874.000	4.734.254.632.000
6. Pajak Alat Berat	33.408.000	35.345.000	37.395.000	39.563.000	41.857.000	44.284.000
7. Opsen MBLB	22.000.000.000	22.220.000.000	22.442.200.000	22,666.622.000	22.893.288.000	23.122.220.000
Retribusi Daerah	1.807.585.183.000	2.174.496.850.000	2.282.062.424.000	2.394,228.940.000	2.510.678.746.000	2.631.981.622.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	707.349.144.000	701.832.870.000	782.124.872.000	916.702.165.000	1.032.760.032.000	1.094.628.383.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	377.032.903.000	336.230.465.000	355.604.527.000	360.168.649.000	349.734.300.000	353.048.516.000

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Hasil Analisis Tahun 2025

Berikutnya proyeksi PAD berhubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut membuka peluang peningkatan PAD dikarenakan mulai tahun 2025 terdapat penyesuaian tarif yang telah memperhitungkan opsen PKB dan BBNKB untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipungut secara bersamaan dengan PKB dan BBNKB menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Sedangkan untuk retribusi sejak tahun 2024 telah mengalami penurunan karena penyesuaian obyek pungutan retribusi semula 32 jenis obyek pungutan menjadi 18 jenis obyek pungutan retribusi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga akan ditopang dengan potensi pajak baru, diantaranya adalah pajak alat berat.

3.1.2 Sasaran Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Secara definisi sasaran adalah turunan dari tujuan. Tercapainya sasaran akan menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang berasal dari program Perangkat Daerah.Perumusan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan potensi fiskal yang dimiliki, tantangan eksternal yang dihadapi, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang adaptif dan responsif. Sasaran yang ditetapkan bersifat terukur dan terarah, sehingga dapat menjadi pedoman bagi perumusan strategi, arah kebijakan, dan program kerja Bapenda di masa mendatang.

Dengan demikian, keberadaan sasaran strategis tidak hanya dipandang sebagai target administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan daerah yang berfungsi memperkuat basis fiskal, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, dinamis, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Adapun sasaran yang akan di capai Bapenda Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Tumbuhnya Penerimaan sektor Pajak Daerah.
2. Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.

Tumbuhnya pendapatan pajak daerah mencerminkan komitmen untuk terus memperluas basis penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, penguatan sistem pelayanan berbasis digital, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan pajak daerah yang tumbuh konsisten, stabilitas penerimaan daerah dapat lebih terjamin.

Tumbuhnya pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. merupakan sumber PAD yang perlu dioptimalkan melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, penyesuaian tarif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang sebanding dengan kontribusi masyarakat. Pencapaian sasaran ini diharapkan dapat memperluas struktur penerimaan daerah sehingga tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor sebagai penyumbang utama.

Selanjutnya, Bapenda menargetkan meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah serta meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah. Pengelolaan risiko diperlukan untuk mengantisipasi ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian PAD, seperti perubahan regulasi, perlambatan ekonomi, atau rendahnya kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan memperkuat integrasi data, memperluas layanan berbasis digital, serta memastikan pelayanan yang cepat, transparan, dan adil. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan pada akhirnya mendorong kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.

Dalam penentuan indiator kinerja tujuan dan sasaran Bapenda dalam RENSTRA 2025-2029 ini memperhitungkan target pendapatan yang telah ditetapkan dengan rumusan target capain menggunakan baseline atau tahun dasar realisasi capaian tahun 2024. Untuk menjaga konsistensi, khusus pendapatan PKB dan BBNKB pada tahun 2024 terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar 30% dari realisasi pendapatan pajak berkenaan sehingga base line atau data dasar realisasi PAD per jenis pendapatan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.2 Realisasi Pendapatan Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

Uraian	Realisasi Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah	**15.285.327.638.939**
Pajak Daerah	**11.844.632.258.976**
1. Pajak Kendaraan Bermotor*	3.953.525.160.301
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*	2.224.122.061.234
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.693.880.376.743
4. Pajak Air Permukaan	18.993.373.282
5. Pajak Rokok	2.954.059.323.916
6. Pajak Alat Berat	51.963.500
7. Opsen MBLB	-
Retribusi Daerah	**2.318.821.514.818**
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	**687.813.166.201**
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**434.060.698.944**

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2025

*) *Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bersifat netto setelah dikurangi dengan kewajiban belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota.*

Tabel III.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	%	4,04	11,64	1.68	5.41	12.07	19.35	26.79	34.36	34.36
		Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	%	3,45	13,53	6.81	8.91	15.75	23.02	30.75	38.94	38.94
		Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	%	8,14	23,82	-15.95	-6.63	-0.61	6.70	13.15	18.57	18.57
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	N.A	80	80.20	80.21	80.22	80.23	80.24	80.25	80.25
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	N.A	3.72	3.72	3.73	3.74	3.75	3.76	3.77	3.77
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	90	80	80	80	80	80	80	80

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Hasil Analisis Tahun 2025

*) Formulasi perhitungan menggunakan dasar realisasi pendapatan tahun 2024:

$$\text{Persentase Pertumbuhan Tahun Y} = \frac{\text{(Target Tahun Y - Realisasi Tahun 2024)}}{\text{Realisasi Tahun 2024}} \times 100\%$$

*) berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah pasal 187 huruf b. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini. tahun 2024;

**) berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah pasal 187 huruf c. yang berdampak pada perubahan skema dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor. dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. menjadi opsen PKB dan BBNKB. sehingga terjadi penurunan potensi pendapatan yang diakibatkan oleh penurunan tarif PKB dari semula 1.5 persen menjadi 1.05 persen dan tarif BBNKB dari semula 12.5 persen menjadi 10 persen.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Strategi dan arah kebijakan Bapenda Provinsi Jawa Tengah tahun 2025–2030 difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengawasan dan tata kelola aset daerah. Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas basis pajak dan retribusi, memperkuat kapasitas aparatur, serta mendorong kepatuhan masyarakat. Dengan strategi dan kebijakan yang terintegrasi, Bapenda diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Adapun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bapenda Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel III.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Tumbuhnya Pendapatan Pajak Daerah	Optimalisasi perencanaan dan pengembangan, Pendataan dan Pendaftaran, Penagihan dan Penyelesaian keberatan pajak daerah, Pengendalian dan Evaluasi Tata Kelola Pajak Daerah serta pengelolaan basis data digitalisasi pelayanan dan sarana prasarana pendukung pelayanan pajak daerah.	• Penguatan basis data pajak daerah dan retribusi daerah • Perbaikan Tata Kelola SAMSAT • Digitalisasi pembayaran pajak daerah
	Tumbuhnya Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain	Evaluasi Tata Kelola retribusi daerah serta pengelolaan basis data digitalisasi pelayanan dan sarana prasarana pendukung pelayanan retribusi daerah	• Optimalisasi pemanfaatan asset daerah • Digitalisasi penatausahaan tarif retribusi dan pelaporan • Digitalisasi pembayaran retribusi daerah
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan resiko kepatuhan. kebijakan. reputasi	• Membangun kesadaran dan budaya risiko • Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam seluruh proses organisasi • Menetapkan strategi penanganan risiko
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah dan sumber daya manusia	• Memperkuat reformasi birokrasi • Penerapan teknologi informasi • Penguatan SDM dan kelembagaan • Peningkatan peran serta masyarakat

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Hasil Analisis Tahun 2025

Tabel III.5 Pentahapan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
• Penguatan basis data potensi pajak daerah melalui pendataan ulang dan/atau pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak daerah. • Pengembangan metode dan implementasi perumusan target pendapatan pajak daerah dan pelayanan pemungutan, pembayaran dan penyetoran pajak daerah.	• Pengembangan metode dan implementasi pelayanan pemungutan pajak daerah. • Pengembangan metode dan implementasi pengelolaan piutang pajak daerah. • Digitalisasi pengelolaan piutang pajak daerah.	• Pengembangan metode dan implementasi pembayaran pajak daerah secara non tunai. • Digitalisasi pelayanan pajak daerah.	Evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan atas penguatan basis data pajak daerah, pengembangan dan implementasi perumusan target pendapatan pajak daerah, pelayanan pemungutan, pembayaran, penyetoran pajak daerah, pengelolaan piutang pajak daerah, pengembangan metode dan implementasi pembayaran pajak daerah secara non tunai, serta digitalisasi pelayanan pajak daerah.	Evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan atas penguatan basis data pajak daerah, pengembangan dan implementasi perumusan target pendapatan pajak daerah, pelayanan pemungutan, pembayaran, penyetoran pajak daerah, pengelolaan piutang pajak daerah, pengembangan metode dan implementasi pembayaran pajak daerah secara non tunai, serta digitalisasi pelayanan pajak daerah.
Penyusunan basis data objek retribusi daerah melalui pendataan, pendataan ulang dan/atau pemutakhiran data wajib retribusi dan objek retribusi	Penguatan basis data objek, penilaian, dan penghitungan potensi retribusi daerah.	Pengembangan metode dan implementasi perumusan target pendapatan retribusi daerah.	Pengembangan metode dan implementasi tata cara pelayanan pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi daerah.	Evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan atas metode penguatan basis data potensi retribusi daerah, implementasi perumusan target pendapatan retribusi daerah dan pelayanan pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi daerah serta Implementasi pengelolaan piutang retribusi daerah.
Penguatan kualitas pengelolaan resiko kepatuhan, kebijakan, reputasi	Penguatan kualitas pengelolaan resiko kepatuhan, Kebijakan, reputasi & Audit Kinerja	Penguatan kualitas pengelolaan resiko kepatuhan, kebijakan, reputasi & Audit Kinerja	Penguatan kualitas pengelolaan resiko kepatuhan, kebijakan, reputasi & Audit Kinerja	Evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan atas penguatan kualitas pengelolaan resiko kepatuhan, kebijakan, reputasi & Audit Kinerja.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Standarisasi kualitas pelayanan	Standarisasi kualitas pelayanan berbasis Teknologi Informasi	Standarisasi kualitas pelayanan berbasis Teknologi Informasi	Standarisasi kualitas pelayanan berbasis Teknologi Informasi	Evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan atas standarisasi kualitas pelayanan berbasis Teknologi Informasi
Mengoptimalkan pemenuhan peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	Penggantian peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor dengan spesifikasi terbaru	Penggantian peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor dengan spesifikasi terbaru	Penggantian peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor dengan spesifikasi terbaru	Evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan atas pemenuhan peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor
Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung pelayanan di setiap unit kerja.	Penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung pelayanan di setiap unit kerja.	Peningkatan kuantitas SDM sebagai pendukung pelayanan di setiap unit kerja (Non-Fungsional)	Peningkatan kuantitas SDM sebagai pendukung pelayanan di setiap unit kerja (Non-Fungsional)	Evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan atas kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung pelayanan di setiap unit kerja.

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Hasil Analisis Tahun 2025

3.3 Manajemen Risiko Strategis Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, Bapenda Provinsi Jawa Tengah perlu menerapkan manajemen risiko strategis yang terintegrasi dengan perencanaan dan pengendalian kinerja. Hal ini penting mengingat dinamika lingkungan ekonomi, regulasi, teknologi, dan perilaku wajib pajak yang dapat memengaruhi pencapaian target PAD.

Manajemen risiko strategis berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi potensi ancaman maupun peluang, menganalisis dampak yang ditimbulkan, serta merumuskan langkah pengendalian agar tujuan strategis tetap tercapai. Penerapan pendekatan ini juga bertujuan untuk meminimalisasi ketidakpastian, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta memastikan keberlangsungan pertumbuhan pendapatan daerah.

Dalam konteks periode perencanaan tahun 2025–2030, Bapenda Provinsi Jawa Tengah menekankan dua tujuan strategis utama, yaitu:

1. Tumbuhnya pendapatan pajak daerah, yang diukur melalui indikator persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah.
2. Tumbuhnya pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, yang diukur melalui indikator persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain.

Kedua tujuan strategis tersebut merefleksikan komitmen Bapenda untuk memperkuat basis PAD dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, kepatuhan, dan keberlanjutan. Namun, pencapaian tujuan tersebut tidak lepas dari potensi risiko strategis, baik yang bersumber dari faktor internal (kapasitas SDM, sistem informasi, sarana prasarana, tata kelola) maupun eksternal (kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi, tingkat kepatuhan masyarakat).

Oleh karena itu, diperlukan perumusan rencana tindak pengendalian risiko yang terarah, komprehensif, dan berkesinambungan. Rencana ini menjadi pedoman operasional dalam memitigasi risiko strategis, sekaligus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan Bapenda mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan PAD.

Berikut disajikan tabel yang memuat tujuan beserta rencana tindak pengendalian risiko strategis Bapenda Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2030.

Tabel III.6 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2030

Tujuan / Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	20 (Sangat Tinggi)	Pandangan masyarakat yang negatif terkait pajak	Meningkatnya piutang pajak daerah	Meningkatkan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak dari frekuensi dan cakupan	Kepala Bapenda	Setiap tahun
		Potensi pajak alat berat tidak maksimal	9 (Sedang)	Belum optimalnya inventarisasi pajak alat berat	Belum optimalnya penerimaan pajak alat berat	Optimalisasi inventarisasi alat berat	Kepala Bapenda	Setiap tahun
		Penjualan kendaraan baru menurun	20 (Sangat Tinggi)	Daya beli masyarakat menurun	Pendapatan BBNKB tidak mencapai target	Bekerjasama dengan asosiasi industry otomotif	Kepala Bapenda	Setiap tahun
		Tingginya piutang Pajak Kendaraan Bermotor	16 (Sangat Tinggi)	Proses penagihan tidak optimal	Tingginya piutang akan berpotensi menurunkan realisasi pajak daerah	Optimalisasi program penanganan piutang pajak daerah	Kepala Bapenda	Setiap tahun
Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain	Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain	Berkurangnya potensi pungutan retribusi daerah	12 (Tinggi)	Masih banyak aset tidak layak untuk di-retribusikan	Penurunan pencapaian realisasi retribusi daerah	Optimalisasi sumber pendapatan lain dan perbaikan aset	Kepala Bapenda (sebagai koordinator) dan OPD penghasil retribusi	Setiap tahun
		Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah	9 (Sedang)	Data objek retribusi belum sempurna	Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target	Perbaikan sistem informasi tata kelola retribusi daerah	Kepala Bapenda	Setiap tahun

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Hasil Analisis Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bapenda
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Program dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan hasil turunan visi dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk membuat Jawa Tengah maju dan berkelanjutan. Berikutnya program perangkat daerah secara konsep adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran, sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan program dan kegiatan dibidang pengelolaan Pendapatan Daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, serta diharapkan program-program ini nantinya dapat mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dan dapat dilaksanakan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang baik, akan semakin mempercepat tujuan untuk peningkatan otonomi fiskal daerah.

Adapun rencana program, kegiatan, dan pendanaan Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel IV.1

Tabel IV.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis *												252.989.172.000		251.471.070.000		264.012.240.000		359.365.478.000		391.043.035.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah *	Angka	80	80,2	80,21		80,22		80,23		80,24		80,25		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah **											252.614.415.000		250.872.304.000		263.575.273.000		358.770.364.000		390.395.455.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah **	Angka	80	80	80	252.614.415.000	80	250.872.304.000	80	263.575.273.000	80	358.770.364.000	80	390.395.455.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									194.129.451.000		185.954.412.000		194.415.736.000		266.003.591.000		289.450.246.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	95	95	95	194.129.451.000	95	185.954.412.000	95	194.415.736.000	95	266.003.591.000	95	289.450.246.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								137.827.111.000		145.900.000.000		159.627.032.000		218.623.846.000		237.897.988.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	137.827.111.000	4	145.900.000.000	4	159.627.032.000	4	218.623.846.000	4	237.897.988.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							136.927.111.000		145.000.000.000		158.757.971.000		217.440.252.000		236.610.048.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	605	605	605	136.927.111.000	605	145.000.000.000	605	158.757.971.000	605	217.440.252.000	605	236.610.048.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							750.000.000		750.000.000		740.138.000		1.008.010.000		1.096.877.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	750.000.000	4	750.000.000	4	740.138.000	4	1.008.010.000	4	1.096.877.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se							150.000.000		150.000.000		128.923.000		175.584.000		191.063.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					mesteran SKPD *****																
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	4	4	4	150.000.000	4	150.000.000	4	128.923.000	4	175.584.000	4	191.063.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								500.000.000		500.000.000		434.218.000		591.371.000		643.507.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	434.218.000	4	591.371.000	4	643.507.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****							500.000.000		500.000.000		434.218.000		591.371.000		643.507.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	4	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	434.218.000	4	591.371.000	4	643.507.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								476.198.000		525.000.000		389.612.000		530.621.000		577.401.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	476.198.000	100	525.000.000	100	389.612.000	100	530.621.000	100	577.401.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							326.198.000		350.000.000		331.312.000		451.221.000		491.001.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	1	1	326.198.000	1	350.000.000	1	331.312.000	1	451.221.000	1	491.001.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							150.000.000		175.000.000		58.300.000		79.400.000		86.400.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	1	1	1	150.000.000	1	175.000.000	1	58.300.000	1	79.400.000	1	86.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								13.330.000.000		13.483.301.000		9.156.967.000		12.412.774.000		13.502.558.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	13.330.000.000	100	13.483.301.000	100	9.156.967.000	100	12.412.774.000	100	13.502.558.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera							150.000.000		150.000.000		99.188.000		135.086.000		146.996.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					ngan Bangunan Kantor *****																
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	99.188.000	1	135.086.000	1	146.996.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							500.000.000		500.000.000		398.332.000		542.497.000		590.325.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	398.332.000	1	542.497.000	1	590.325.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							10.000.000.000		10.000.000.000		7.033.087.000		9.578.510.000		10.422.962.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	7.033.087.000	1	9.578.510.000	1	10.422.962.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							100.000.000		150.000.000		46.431.000		63.236.000		68.811.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	100.000.000	4	150.000.000	4	46.431.000	4	63.236.000	4	68.811.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							yang Disediakan *****														DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							1.000.000.000		1.100.000.000		571.706.000		778.619.000		847.263.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	1.000.000.000	4	1.100.000.000	4	571.706.000	4	778.619.000	4	847.263.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							1.500.000.000		1.500.001.000		923.243.000		1.207.658.000		1.324.361.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	1.500.000.000	4	1.500.001.000	4	923.243.000	4	1.207.658.000	4	1.324.361.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							30.000.000		33.300.000		34.980.000		47.640.000		51.840.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	30.000.000	4	33.300.000	4	34.980.000	4	47.640.000	4	51.840.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		59.528.000		50.000.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	59.528.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin								13.200.000.000		4.750.000.000		6.768.917.000		9.277.299.000		10.095.197.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				tah Daerah ****																	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	13.200.000.000	1	4.750.000.000	1	6.768.917.000	1	9.277.299.000	1	10.095.197.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							3.200.000.000		0		2.276.181.000		3.099.979.000		3.373.277.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	1	3.200.000.000	N/A	0	1	2.276.181.000	1	3.099.979.000	1	3.373.277.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.000.000.000		4.750.000.000		4.492.736.000		6.177.320.000		6.721.920.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	10.000.000.000	1	4.750.000.000	1	4.492.736.000	1	6.177.320.000	1	6.721.920.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					atau Bangunan Lainnya *****																
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								18.025.000.000		14.944.483.000		15.698.440.000		21.380.037.000		23.264.926.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	18.025.000.000	4	14.944.483.000	4	15.698.440.000	4	21.380.037.000	4	23.264.926.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							25.000.000		7.104.000		7.462.000		10.163.000		11.059.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	25.000.000	4	7.104.000	4	7.462.000	4	10.163.000	4	11.059.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							3.500.000.000		2.350.136.000		2.468.702.000		3.362.177.000		3.658.591.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	3.500.000.000	4	2.350.136.000	4	2.468.702.000	4	3.362.177.000	4	3.658.591.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							11.000.000.000		10.330.348.000		10.851.519.000		14.778.913.000		16.081.839.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	11.000.000.000	4	10.330.348.000	4	10.851.519.000	4	14.778.913.000	4	16.081.839.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							3.500.000.000		2.256.895.000		2.370.757.000		3.228.784.000		3.513.437.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	3.500.000.000	4	2.256.895.000	4	2.370.757.000	4	3.228.784.000	4	3.513.437.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								10.771.142.000		5.851.628.000		2.340.550.000		3.187.643.000		3.468.669.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	10.771.142.000	1	5.851.628.000	1	2.340.550.000	1	3.187.643.000	1	3.468.669.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas							1.000.000.000		1.000.000.000		613.398.000		835.399.000		909.049.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Operasional atau Lapangan *****																
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	613.398.000	1	835.399.000	1	909.049.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							1.500.000.000		956.660.000		868.810.000		1.183.251.000		1.287.567.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	1.500.000.000	1	956.660.000	1	868.810.000	1	1.183.251.000	1	1.287.567.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							100.000.000		150.000.000		75.790.000		103.220.000		112.320.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	75.790.000	1	103.220.000	1	112.320.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor							7.500.000.000		3.000.000.000		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					atau Bangunan Lainnya *****																
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	1	7.500.000.000	1	3.000.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							671.142.000		744.968.000		782.552.000		1.065.773.000		1.159.733.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	671.142.000	1	744.968.000	1	782.552.000	1	1.065.773.000	1	1.159.733.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									2.088.509.000		2.318.244.000		2.435.203.000		3.316.951.000		3.609.377.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I ***	%	95	95	95	2.088.509.000	95	2.318.244.000	95	2.435.203.000	95	3.316.951.000	95	3.609.377.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.887.000		73.872.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.887.000	4	73.872.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.887.000		73.872.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.887.000	4	73.872.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								5.500.000		6.105.000		6.413.000		8.734.000		9.504.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	5.500.000	4	6.105.000	4	6.413.000	4	8.734.000	4	9.504.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik							5.500.000		6.105.000		6.413.000		8.734.000		9.504.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Daerah SKPD *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	5.500.000	4	6.105.000	4	6.413.000	4	8.734.000	4	9.504.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								200.580.000		222.643.000		233.877.000		318.522.000		346.603.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	200.580.000	100	222.643.000	100	233.877.000	100	318.522.000	100	346.603.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							8.560.000		9.502.000		9.981.000		13.593.000		14.792.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	8.560.000	1	9.502.000	1	9.981.000	1	13.593.000	1	14.792.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							17.375.000		19.286.000		20.259.000		27.592.000		30.024.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	17.375.000	1	19.286.000	1	20.259.000	1	27.592.000	1	30.024.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan							16.748.000		18.590.000		19.528.000		26.596.000		28.941.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Penggandaan *****																Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	16.748.000	1	18.590.000	1	19.528.000	1	26.596.000	1	28.941.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							600.000		666.000		700.000		953.000		1.037.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	600.000	4	666.000	4	700.000	4	953.000	4	1.037.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							102.793.000		114.100.000		119.857.000		163.235.000		177.626.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	102.793.000	1	114.100.000	1	119.857.000	1	163.235.000	1	177.626.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							20.120.000		22.333.000		23.460.000		31.951.000		34.767.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	20.120.000	4	22.333.000	4	23.460.000	4	31.951.000	4	34.767.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							34.384.000		38.166.000		40.092.000		54.602.000		59.416.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	34.384.000	4	38.166.000	4	40.092.000	4	54.602.000	4	59.416.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Semarang I
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.575.299.000		1.748.582.000		1.836.799.000		2.501.575.000		2.722.117.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.575.299.000	4	1.748.582.000	4	1.836.799.000	4	2.501.575.000	4	2.722.117.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.110.000		1.166.000		1.588.000		1.728.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.000.000	4	1.110.000	4	1.166.000	4	1.588.000	4	1.728.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							329.150.000		365.357.000		383.789.000		522.690.000		568.771.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	329.150.000	4	365.357.000	4	383.789.000	4	522.690.000	4	568.771.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan							253.100.000		280.941.000		295.115.000		401.923.000		437.357.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					dan Perlengkapan Kantor *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	253.100.000	4	280.941.000	4	295.115.000	4	401.923.000	4	437.357.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							992.049.000		1.101.174.000		1.156.729.000		1.575.374.000		1.714.261.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	992.049.000	4	1.101.174.000	4	1.156.729.000	4	1.575.374.000	4	1.714.261.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								264.630.000		293.739.000		308.559.000		420.233.000		457.281.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	264.630.000	1	293.739.000	1	308.559.000	1	420.233.000	1	457.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****																n Daerah Semarang I
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							97.047.000		107.722.000		113.157.000		154.111.000		167.697.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	97.047.000	1	107.722.000	1	113.157.000	1	154.111.000	1	167.697.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							30.193.000		33.514.000		35.205.000		47.946.000		52.174.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	30.193.000	1	33.514.000	1	35.205.000	1	47.946.000	1	52.174.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							3.940.000		4.373.000		4.594.000		6.257.000		6.808.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	3.940.000	1	4.373.000	1	4.594.000	1	6.257.000	1	6.808.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							80.000.000		88.800.000		93.280.000		127.040.000		138.240.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	80.000.000	1	88.800.000	1	93.280.000	1	127.040.000	1	138.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							53.450.000		59.330.000		62.323.000		84.879.000		92.362.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	53.450.000	1	59.330.000	1	62.323.000	1	84.879.000	1	92.362.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****																Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.554.814.000		1.725.846.000		1.812.913.000		2.460.309.000		2.677.212.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II ***	%	95	95	95	1.554.814.000	95	1.725.846.000	95	1.812.913.000	95	2.460.309.000	95	2.677.212.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		58.756.000		63.936.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	58.756.000	4	63.936.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		58.756.000		63.936.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	58.756.000	4	63.936.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Terlaksananya Pengamanan	Jumlah Dokumen Pengamanan	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								194.416.000		215.803.000		226.689.000		308.732.000		335.949.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	194.416.000	100	215.803.000	100	226.689.000	100	308.732.000	100	335.949.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan							6.405.000		7.110.000		7.468.000		10.171.000		11.068.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Bangunan Kantor *****																n Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.405.000	1	7.110.000	1	7.468.000	1	10.171.000	1	11.068.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							28.650.000		31.802.000		33.406.000		45.496.000		49.507.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	28.650.000	1	31.802.000	1	33.406.000	1	45.496.000	1	49.507.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							18.370.000		20.391.000		21.419.000		29.172.000		31.743.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	18.370.000	1	20.391.000	1	21.419.000	1	29.172.000	1	31.743.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.800.000		1.998.000		2.099.000		2.858.000		3.110.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.800.000	4	1.998.000	4	2.099.000	4	2.858.000	4	3.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							90.866.000		100.861.000		105.950.000		144.295.000		157.016.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	90.866.000	1	100.861.000	1	105.950.000	1	144.295.000	1	157.016.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							12.105.000		13.437.000		14.114.000		19.223.000		20.917.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	12.105.000	4	13.437.000	4	14.114.000	4	19.223.000	4	20.917.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							31.220.000		34.654.000		36.403.000		49.577.000		53.948.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	31.220.000	4	34.654.000	4	36.403.000	4	49.577.000	4	53.948.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	5.000.000	4	5.550.000	4	5.830.000	4	7.940.000	4	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunja								1.075.815.000		1.194.155.000		1.254.400.000		1.708.394.000		1.859.008.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				ng Urusan Pemerintahan Daerah ****																	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.075.815.000	4	1.194.155.000	4	1.254.400.000	4	1.708.394.000	4	1.859.008.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.280.000		1.421.000		1.492.000		2.033.000		2.212.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.280.000	4	1.421.000	4	1.492.000	4	2.033.000	4	2.212.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							365.800.000		406.038.000		426.523.000		580.890.000		632.102.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	365.800.000	4	406.038.000	4	426.523.000	4	580.890.000	4	632.102.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							9.150.000		10.157.000		10.669.000		14.530.000		15.811.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Laporan	4	4	4	9.150.000	4	10.157.000	4	10.669.000	4	14.530.000	4	15.811.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							699.585.000		776.539.000		815.716.000		1.110.941.000		1.208.883.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	699.585.000	4	776.539.000	4	815.716.000	4	1.110.941.000	4	1.208.883.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								242.083.000		268.713.000		282.269.000		384.427.000		418.319.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	242.083.000	1	268.713.000	1	282.269.000	1	384.427.000	1	418.319.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							21.487.000		23.851.000		25.054.000		34.121.000		37.130.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	21.487.000	1	23.851.000	1	25.054.000	1	34.121.000	1	37.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							90.175.000		100.094.000		105.144.000		143.198.000		155.822.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	90.175.000	1	100.094.000	1	105.144.000	1	143.198.000	1	155.822.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							37.255.000		41.353.000		43.439.000		59.161.000		64.377.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	37.255.000	1	41.353.000	1	43.439.000	1	59.161.000	1	64.377.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Semarang II
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.100.000	1	11.660.000	1	15.880.000	1	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							49.216.000		54.630.000		57.386.000		78.155.000		85.045.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	49.216.000	1	54.630.000	1	57.386.000	1	78.155.000	1	85.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							25.150.000		27.917.000		29.325.000		39.938.000		43.459.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	25.150.000	1	27.917.000	1	29.325.000	1	39.938.000	1	43.459.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							8.800.000		9.768.000		10.261.000		13.974.000		15.206.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	1	1	8.800.000	1	9.768.000	1	10.261.000	1	13.974.000	1	15.206.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							Dipelihara/Direhabilitasi *****														
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.800.908.000		1.999.009.000		2.099.858.000		2.859.843.000		3.111.970.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III ***	%	95	95	95	1.800.908.000	95	1.999.009.000	95	2.099.858.000	95	2.859.843.000	95	3.111.970.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.490.000		73.440.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.490.000	4	73.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.490.000		73.440.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.490.000	4	73.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan							0		0		0		0		0	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								176.337.000		195.735.000		205.609.000		280.023.000		304.711.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	176.337.000	100	195.735.000	100	205.609.000	100	280.023.000	100	304.711.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.124.000		5.688.000		5.975.000		8.137.000		8.854.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.124.000	1	5.688.000	1	5.975.000	1	8.137.000	1	8.854.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							45.284.000		50.265.000		52.801.000		71.911.000		78.251.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	45.284.000	1	50.265.000	1	52.801.000	1	71.911.000	1	78.251.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							21.133.000		23.458.000		24.641.000		33.559.000		36.518.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	21.133.000	1	23.458.000	1	24.641.000	1	33.559.000	1	36.518.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.206.000		1.339.000		1.406.000		1.915.000		2.084.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.206.000	4	1.339.000	4	1.406.000	4	1.915.000	4	2.084.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							56.000.000		62.160.000		65.296.000		88.928.000		96.768.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	56.000.000	1	62.160.000	1	65.296.000	1	88.928.000	1	96.768.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							15.390.000		17.083.000		17.945.000		24.439.000		26.594.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	15.390.000	4	17.083.000	4	17.945.000	4	24.439.000	4	26.594.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							32.200.000		35.742.000		37.545.000		51.134.000		55.642.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	32.200.000	4	35.742.000	4	37.545.000	4	51.134.000	4	55.642.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.255.707.000		1.393.834.000		1.464.153.000		1.994.063.000		2.169.862.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Laporan	4	4	4	1.255.707.000	4	1.393.834.000	4	1.464.153.000	4	1.994.063.000	4	2.169.862.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						dengan kebutuhan perangkat daerah	daerah yang disusun ****														
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.280.000		1.421.000		1.492.000		2.033.000		2.212.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.280.000	4	1.421.000	4	1.492.000	4	2.033.000	4	2.212.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							370.712.000		411.490.000		432.250.000		588.691.000		640.590.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	370.712.000	4	411.490.000	4	432.250.000	4	588.691.000	4	640.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							16.640.000		18.470.000		19.402.000		26.424.000		28.754.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	16.640.000	4	18.470.000	4	19.402.000	4	26.424.000	4	28.754.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							867.075.000		962.453.000		1.011.009.000		1.376.915.000		1.498.306.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Semarang III
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	867.075.000	4	962.453.000	4	1.011.009.000	4	1.376.915.000	4	1.498.306.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								326.364.000		362.265.000		380.541.000		518.267.000		563.957.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	326.364.000	1	362.265.000	1	380.541.000	1	518.267.000	1	563.957.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							15.341.000		17.029.000		17.888.000		24.362.000		26.509.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	15.341.000	1	17.029.000	1	17.888.000	1	24.362.000	1	26.509.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional							107.037.000		118.811.000		124.805.000		169.975.000		184.960.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					atau Lapangan *****																
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	107.037.000	1	118.811.000	1	124.805.000	1	169.975.000	1	184.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							59.983.000		66.581.000		69.940.000		95.253.000		103.651.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	59.983.000	1	66.581.000	1	69.940.000	1	95.253.000	1	103.651.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor							96.823.000		107.474.000		112.896.000		153.755.000		167.310.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					dan Bangunan Lainnya *****																n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	96.823.000	1	107.474.000	1	112.896.000	1	153.755.000	1	167.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							39.700.000		44.067.000		46.290.000		63.044.000		68.602.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	39.700.000	1	44.067.000	1	46.290.000	1	63.044.000	1	68.602.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							7.480.000		8.303.000		8.722.000		11.878.000		12.925.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	7.480.000	1	8.303.000	1	8.722.000	1	11.878.000	1	12.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									2.252.569.000		2.499.908.000		2.626.495.000		3.576.444.000		3.891.748.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			PROVINSI ***																		n Daerah Ungaran
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran ***	%	95	95	95	2.252.569.000	95	2.499.908.000	95	2.626.495.000	95	3.576.444.000	95	3.891.748.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		46.731.000		49.555.000		66.855.000		72.749.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	46.731.000	4	49.555.000	4	66.855.000	4	72.749.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		46.731.000		49.555.000		66.855.000		72.749.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	46.731.000	4	49.555.000	4	66.855.000	4	72.749.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								209.927.000		233.019.000		244.775.000		333.364.000		362.754.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	209.927.000	100	233.019.000	100	244.775.000	100	333.364.000	100	362.754.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							12.019.000		13.341.000		14.014.000		19.086.000		20.769.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	12.019.000	1	13.341.000	1	14.014.000	1	19.086.000	1	20.769.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							34.451.000		38.241.000		40.170.000		54.708.000		59.531.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	34.451.000	1	38.241.000	1	40.170.000	1	54.708.000	1	59.531.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.000.000	1	11.100.000	1	11.660.000	1	15.880.000	1	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							80.000.000		88.800.000		93.280.000		127.040.000		138.240.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	80.000.000	1	88.800.000	1	93.280.000	1	127.040.000	1	138.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							22.573.000		25.056.000		26.320.000		35.846.000		39.006.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	22.573.000	4	25.056.000	4	26.320.000	4	35.846.000	4	39.006.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							50.884.000		56.481.000		59.331.000		80.804.000		87.928.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	50.884.000	4	56.481.000	4	59.331.000	4	80.804.000	4	87.928.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan							0		0		0		0		0	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Mesin Lainnya *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.607.580.000		1.784.414.000		1.874.438.000		2.552.837.000		2.777.898.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.607.580.000	4	1.784.414.000	4	1.874.438.000	4	2.552.837.000	4	2.777.898.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.500.000		1.665.000		1.749.000		2.382.000		2.592.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.500.000	4	1.665.000	4	1.749.000	4	2.382.000	4	2.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							408.000.000		452.880.000		475.728.000		647.904.000		705.024.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	408.000.000	4	452.880.000	4	475.728.000	4	647.904.000	4	705.024.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							15.000.000		16.650.000		17.490.000		23.820.000		25.920.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	15.000.000	4	16.650.000	4	17.490.000	4	23.820.000	4	25.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1.183.080.000		1.313.219.000		1.379.471.000		1.878.731.000		2.044.362.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	1.183.080.000	4	1.313.219.000	4	1.379.471.000	4	1.878.731.000	4	2.044.362.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								392.562.000		435.744.000		457.727.000		623.388.000		678.347.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	392.562.000	1	435.744.000	1	457.727.000	1	623.388.000	1	678.347.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan							40.320.000		44.755.000		47.013.000		64.028.000		69.673.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****																n Daerah Ungaran
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	40.320.000	1	44.755.000	1	47.013.000	1	64.028.000	1	69.673.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								206.500.000		229.215.000		240.779.000		327.922.000		356.832.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	206.500.000	1	229.215.000	1	240.779.000	1	327.922.000	1	356.832.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							50.830.000		56.421.000		59.268.000		80.718.000		87.834.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	1	1	50.830.000	1	56.421.000	1	59.268.000	1	80.718.000	1	87.834.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Peralatan dan Mesin Lainnya	yang Dipelihara *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							4.000.000		4.440.000		4.664.000		6.352.000		6.912.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	4.000.000	1	4.440.000	1	4.664.000	1	6.352.000	1	6.912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							49.706.000		55.174.000		57.957.000		78.933.000		85.892.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	49.706.000	1	55.174.000	1	57.957.000	1	78.933.000	1	85.892.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							31.291.000		34.733.000		36.485.000		49.690.000		54.071.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	31.291.000	1	34.733.000	1	36.485.000	1	49.690.000	1	54.071.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.915.000		11.006.000		11.561.000		15.745.000		17.133.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	9.915.000	1	11.006.000	1	11.561.000	1	15.745.000	1	17.133.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.188.765.000		1.319.530.000		1.386.100.000		1.887.760.000		2.054.185.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga ***	%	95	95	95	1.188.765.000	95	1.319.530.000	95	1.386.100.000	95	1.887.760.000	95	2.054.185.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.550.000		47.231.000		49.613.000		67.569.000		73.526.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.550.000	4	47.231.000	4	49.613.000	4	67.569.000	4	73.526.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.550.000		47.231.000		49.613.000		67.569.000		73.526.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.550.000	4	47.231.000	4	49.613.000	4	67.569.000	4	73.526.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Meningkatnya layanan	Persentase layanan administrasi	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						administrasi kepegawaian perangkat daerah	kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								216.047.000		239.812.000		251.911.000		343.083.000		373.329.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	216.047.000	100	239.812.000	100	251.911.000	100	343.083.000	100	373.329.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							1.921.000		2.132.000		2.240.000		3.051.000		3.319.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	1.921.000	1	2.132.000	1	2.240.000	1	3.051.000	1	3.319.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							72.000.000		79.920.000		83.952.000		114.336.000		124.416.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	72.000.000	1	79.920.000	1	83.952.000	1	114.336.000	1	124.416.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							14.626.000		16.235.000		17.054.000		23.226.000		25.274.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	14.626.000	1	16.235.000	1	17.054.000	1	23.226.000	1	25.274.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							900.000		999.000		1.049.000		1.429.000		1.555.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	900.000	4	999.000	4	1.049.000	4	1.429.000	4	1.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							64.342.000		71.420.000		75.023.000		102.175.000		111.183.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	64.342.000	1	71.420.000	1	75.023.000	1	102.175.000	1	111.183.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							13.228.000		14.683.000		15.424.000		21.006.000		22.858.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	13.228.000	4	14.683.000	4	15.424.000	4	21.006.000	4	22.858.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							39.030.000		43.323.000		45.509.000		61.980.000		67.444.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	39.030.000	4	43.323.000	4	45.509.000	4	61.980.000	4	67.444.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	10.000.000	4	11.100.000	4	11.660.000	4	15.880.000	4	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunja								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				ng Urusan Pemerintah Daerah ****																	n Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								642.325.000		712.981.000		748.951.000		1.020.013.000		1.109.937.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	642.325.000	4	712.981.000	4	748.951.000	4	1.020.013.000	4	1.109.937.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.110.000		1.166.000		1.588.000		1.728.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.000.000	4	1.110.000	4	1.166.000	4	1.588.000	4	1.728.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							144.120.000		159.973.000		168.044.000		228.863.000		249.039.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	144.120.000	4	159.973.000	4	168.044.000	4	228.863.000	4	249.039.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							497.205.000		551.898.000		579.741.000		789.562.000		859.170.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	497.205.000	4	551.898.000	4	579.741.000	4	789.562.000	4	859.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								287.843.000		319.506.000		335.625.000		457.095.000		497.393.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	287.843.000	1	319.506.000	1	335.625.000	1	457.095.000	1	497.393.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							18.918.000		20.999.000		22.058.000		30.042.000		32.690.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	18.918.000	1	20.999.000	1	22.058.000	1	30.042.000	1	32.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							99.772.000		110.747.000		116.334.000		158.438.000		172.406.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	99.772.000	1	110.747.000	1	116.334.000	1	158.438.000	1	172.406.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							37.788.000		41.945.000		44.061.000		60.007.000		65.298.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	37.788.000	1	41.945.000	1	44.061.000	1	60.007.000	1	65.298.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.100.000	1	11.660.000	1	15.880.000	1	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							80.386.000		89.228.000		93.730.000		127.653.000		138.907.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	80.386.000	1	89.228.000	1	93.730.000	1	127.653.000	1	138.907.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							32.979.000		36.607.000		38.454.000		52.371.000		56.988.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	32.979.000	1	36.607.000	1	38.454.000	1	52.371.000	1	56.988.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							8.000.000		8.880.000		9.328.000		12.704.000		13.824.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	8.000.000	1	8.880.000	1	9.328.000	1	12.704.000	1	13.824.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.382.691.000		1.534.786.000		1.612.219.000		2.195.714.000		2.389.288.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal ***	%	95	95	95	1.382.691.000	95	1.534.786.000	95	1.612.219.000	95	2.195.714.000	95	2.389.288.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.514.000		47.191.000		49.571.000		67.512.000		73.464.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Meningkatnya layanan administrasi	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan	Dokumen	4	4	4	42.514.000	4	47.191.000	4	49.571.000	4	67.512.000	4	73.464.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						keuangan perangkat daerah	perangkat daerah yang disusun ****														
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.514.000		47.191.000		49.571.000		67.512.000		73.464.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.514.000	4	47.191.000	4	49.571.000	4	67.512.000	4	73.464.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								171.243.000		190.079.000		199.670.000		271.935.000		295.908.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	171.243.000	100	190.079.000	100	199.670.000	100	271.935.000	100	295.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan							5.663.000		6.286.000		6.603.000		8.993.000		9.786.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Bangunan Kantor *****																n Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.663.000	1	6.286.000	1	6.603.000	1	8.993.000	1	9.786.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							20.506.000		22.762.000		23.910.000		32.564.000		35.434.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	20.506.000	1	22.762.000	1	23.910.000	1	32.564.000	1	35.434.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							21.076.000		23.394.000		24.575.000		33.469.000		36.419.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	21.076.000	1	23.394.000	1	24.575.000	1	33.469.000	1	36.419.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							5.973.000		6.630.000		6.965.000		9.485.000		10.321.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.973.000	1	6.630.000	1	6.965.000	1	9.485.000	1	10.321.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan							840.000		932.000		979.000		1.334.000		1.452.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Perundang-Undangan *****																Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	840.000	4	932.000	4	979.000	4	1.334.000	4	1.452.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							62.474.000		69.346.000		72.845.000		99.209.000		107.955.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	62.474.000	1	69.346.000	1	72.845.000	1	99.209.000	1	107.955.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							13.585.000		15.079.000		15.840.000		21.573.000		23.475.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	13.585.000	4	15.079.000	4	15.840.000	4	21.573.000	4	23.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							41.126.000		45.650.000		47.953.000		65.308.000		71.066.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	41.126.000	4	45.650.000	4	47.953.000	4	65.308.000	4	71.066.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					pada SKPD *****																n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								934.178.000		1.036.937.000		1.089.252.000		1.483.475.000		1.614.259.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Laporan	4	4	4	934.178.000	4	1.036.937.000	4	1.089.252.000	4	1.483.475.000	4	1.614.259.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						dengan kebutuhan perangkat daerah	daerah yang disusun ****														
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.377.000		1.528.000		1.606.000		2.187.000		2.379.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.377.000	4	1.528.000	4	1.606.000	4	2.187.000	4	2.379.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							262.970.000		291.897.000		306.623.000		417.596.000		454.412.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	262.970.000	4	291.897.000	4	306.623.000	4	417.596.000	4	454.412.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							669.831.000		743.512.000		781.023.000		1.063.692.000		1.157.468.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	669.831.000	4	743.512.000	4	781.023.000	4	1.063.692.000	4	1.157.468.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								234.756.000		260.579.000		273.726.000		372.792.000		405.657.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	234.756.000	1	260.579.000	1	273.726.000	1	372.792.000	1	405.657.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							25.285.000		28.066.000		29.482.000		40.153.000		43.692.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	25.285.000	1	28.066.000	1	29.482.000	1	40.153.000	1	43.692.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							83.613.000		92.810.000		97.493.000		132.777.000		144.483.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1	1	1	83.613.000	1	92.810.000	1	97.493.000	1	132.777.000	1	144.483.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****															TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							35.787.000		39.724.000		41.728.000		56.830.000		61.840.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	35.787.000	1	39.724.000	1	41.728.000	1	56.830.000	1	61.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							65.778.000		73.014.000		76.697.000		104.455.000		113.664.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	65.778.000	1	73.014.000	1	76.697.000	1	104.455.000	1	113.664.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							24.293.000		26.965.000		28.326.000		38.577.000		41.978.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	24.293.000	1	26.965.000	1	28.326.000	1	38.577.000	1	41.978.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.359.630.000		1.509.191.000		1.585.329.000		2.158.614.000		2.348.921.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak ***	%	95	95	95	1.359.630.000	95	1.509.191.000	95	1.585.329.000	95	2.158.614.000	95	2.348.921.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Demak
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	5.000.000	4	5.550.000	4	5.830.000	4	7.940.000	4	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	5.000.000	4	5.550.000	4	5.830.000	4	7.940.000	4	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat								181.663.000		201.646.000		211.820.000		288.480.000		313.913.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Daerah ****																	Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	181.663.000	100	201.646.000	100	211.820.000	100	288.480.000	100	313.913.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.764.000		6.398.000		6.721.000		9.153.000		9.960.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.764.000	1	6.398.000	1	6.721.000	1	9.153.000	1	9.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							40.890.000		45.388.000		47.678.000		64.933.000		70.658.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	40.890.000	1	45.388.000	1	47.678.000	1	64.933.000	1	70.658.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang							11.160.000		12.388.000		13.013.000		17.722.000		19.284.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Cetakan dan Penggandaan *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	11.160.000	1	12.388.000	1	13.013.000	1	17.722.000	1	19.284.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.800.000		1.998.000		2.099.000		2.858.000		3.110.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.800.000	4	1.998.000	4	2.099.000	4	2.858.000	4	3.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							60.928.000		67.630.000		71.042.000		96.754.000		105.284.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	60.928.000	1	67.630.000	1	71.042.000	1	96.754.000	1	105.284.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							8.110.000		9.002.000		9.456.000		12.879.000		14.014.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	8.110.000	4	9.002.000	4	9.456.000	4	12.879.000	4	14.014.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							53.011.000		58.842.000		61.811.000		84.181.000		91.603.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	53.011.000	4	58.842.000	4	61.811.000	4	84.181.000	4	91.603.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								814.965.000		904.612.000		950.249.000		1.294.164.000		1.408.259.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	814.965.000	4	904.612.000	4	950.249.000	4	1.294.164.000	4	1.408.259.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.150.000		2.387.000		2.507.000		3.414.000		3.715.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	2.150.000	4	2.387.000	4	2.507.000	4	3.414.000	4	3.715.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							162.800.000		180.708.000		189.825.000		258.526.000		281.318.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	162.800.000	4	180.708.000	4	189.825.000	4	258.526.000	4	281.318.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							650.015.000		721.517.000		757.917.000		1.032.224.000		1.123.226.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	650.015.000	4	721.517.000	4	757.917.000	4	1.032.224.000	4	1.123.226.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								315.502.000		350.208.000		367.875.000		501.016.000		545.187.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	315.502.000	1	350.208.000	1	367.875.000	1	501.016.000	1	545.187.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							23.599.000		26.195.000		27.516.000		37.475.000		40.779.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	1	1	1	23.599.000	1	26.195.000	1	27.516.000	1	37.475.000	1	40.779.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****															TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							142.771.000		158.476.000		166.471.000		226.720.000		246.708.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	142.771.000	1	158.476.000	1	166.471.000	1	226.720.000	1	246.708.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							34.606.000		38.413.000		40.351.000		54.954.000		59.799.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	34.606.000	1	38.413.000	1	40.351.000	1	54.954.000	1	59.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							3.000.000		3.330.000		3.498.000		4.764.000		5.184.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	3.000.000	1	3.330.000	1	3.498.000	1	4.764.000	1	5.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							82.026.000		91.049.000		95.642.000		130.257.000		141.741.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	82.026.000	1	91.049.000	1	95.642.000	1	130.257.000	1	141.741.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							22.500.000		24.975.000		26.235.000		35.730.000		38.880.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	22.500.000	1	24.975.000	1	26.235.000	1	35.730.000	1	38.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							7.000.000		7.770.000		8.162.000		11.116.000		12.096.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	7.000.000	1	7.770.000	1	8.162.000	1	11.116.000	1	12.096.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.436.160.000		1.594.137.000		1.674.563.000		2.280.624.000		2.481.685.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi ***	%	95	95	95	1.436.160.000	95	1.594.137.000	95	1.674.563.000	95	2.280.624.000	95	2.481.685.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.490.000		73.440.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.490.000	4	73.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.490.000		73.440.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.490.000	4	73.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	5.000.000	4	5.550.000	4	5.830.000	4	7.940.000	4	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	5.000.000	4	5.550.000	4	5.830.000	4	7.940.000	4	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Kepegawaian *****																n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								212.309.000		235.662.000		247.552.000		337.147.000		366.869.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	212.309.000	100	235.662.000	100	247.552.000	100	337.147.000	100	366.869.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							8.183.000		9.083.000		9.541.000		12.995.000		14.140.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	8.183.000	1	9.083.000	1	9.541.000	1	12.995.000	1	14.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							41.702.000		46.289.000		48.625.000		66.223.000		72.061.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	41.702.000	1	46.289.000	1	48.625.000	1	66.223.000	1	72.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							9.300.000		10.323.000		10.844.000		14.768.000		16.070.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	9.300.000	1	10.323.000	1	10.844.000	1	14.768.000	1	16.070.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							510.000		566.000		595.000		810.000		881.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	510.000	4	566.000	4	595.000	4	810.000	4	881.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							55.815.000		61.955.000		65.080.000		88.634.000		96.448.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	Paket	1	1	1	55.815.000	1	61.955.000	1	65.080.000	1	88.634.000	1	96.448.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							yang Disediakan *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							23.340.000		25.907.000		27.214.000		37.064.000		40.332.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	23.340.000	4	25.907.000	4	27.214.000	4	37.064.000	4	40.332.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							73.459.000		81.539.000		85.653.000		116.653.000		126.937.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	73.459.000	4	81.539.000	4	85.653.000	4	116.653.000	4	126.937.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								903.800.000		1.003.218.000		1.053.831.000		1.435.235.000		1.561.767.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	903.800.000	4	1.003.218.000	4	1.053.831.000	4	1.435.235.000	4	1.561.767.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.500.000		1.665.000		1.749.000		2.382.000		2.592.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.500.000	4	1.665.000	4	1.749.000	4	2.382.000	4	2.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							231.700.000		257.187.000		270.162.000		367.940.000		400.378.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	231.700.000	4	257.187.000	4	270.162.000	4	367.940.000	4	400.378.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							670.600.000		744.366.000		781.920.000		1.064.913.000		1.158.797.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	670.600.000	4	744.366.000	4	781.920.000	4	1.064.913.000	4	1.158.797.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								272.551.000		302.532.000		317.795.000		432.812.000		470.969.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	Unit	1	1	1	272.551.000	1	302.532.000	1	317.795.000	1	432.812.000	1	470.969.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							dilakukan pemeliharaan ****														
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							18.993.000		21.082.000		22.146.000		30.161.000		32.820.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	18.993.000	1	21.082.000	1	22.146.000	1	30.161.000	1	32.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							97.950.000		108.725.000		114.210.000		155.545.000		169.258.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	97.950.000	1	108.725.000	1	114.210.000	1	155.545.000	1	169.258.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan							46.000.000		51.060.000		53.636.000		73.048.000		79.488.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Mesin Lainnya *****																n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	46.000.000	1	51.060.000	1	53.636.000	1	73.048.000	1	79.488.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							2.000.000		2.220.000		2.332.000		3.176.000		3.456.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	2.000.000	1	2.220.000	1	2.332.000	1	3.176.000	1	3.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							89.608.000		99.465.000		104.483.000		142.298.000		154.843.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	89.608.000	1	99.465.000	1	104.483.000	1	142.298.000	1	154.843.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							18.000.000		19.980.000		20.988.000		28.584.000		31.104.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	18.000.000	1	19.980.000	1	20.988.000	1	28.584.000	1	31.104.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.534.551.000		1.703.352.000		1.789.286.000		2.436.073.000		2.650.840.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta ***	%	95	95	95	1.534.551.000	95	1.703.352.000	95	1.789.286.000	95	2.436.073.000	95	2.650.840.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		66.696.000		72.576.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	66.696.000	4	72.576.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		66.696.000		72.576.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	66.696.000	4	72.576.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi								0		0		0		0		0	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Kepegawaian Perangkat Daerah ****																	Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								157.894.000		175.263.000		184.104.000		250.736.000		272.840.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	157.894.000	100	175.263.000	100	184.104.000	100	250.736.000	100	272.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							6.182.000		6.862.000		7.208.000		9.817.000		10.682.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	1	1	6.182.000	1	6.862.000	1	7.208.000	1	9.817.000	1	10.682.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							300.000		333.000		350.000		476.000		518.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	300.000	1	333.000	1	350.000	1	476.000	1	518.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							9.000.000		9.990.000		10.494.000		14.292.000		15.552.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	9.000.000	1	9.990.000	1	10.494.000	1	14.292.000	1	15.552.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.600.000		1.776.000		1.866.000		2.541.000		2.765.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.600.000	4	1.776.000	4	1.866.000	4	2.541.000	4	2.765.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							92.646.000		102.837.000		108.025.000		147.122.000		160.092.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	92.646.000	1	102.837.000	1	108.025.000	1	147.122.000	1	160.092.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							12.750.000		14.153.000		14.866.000		20.247.000		22.032.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	12.750.000	4	14.153.000	4	14.866.000	4	20.247.000	4	22.032.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							35.416.000		39.312.000		41.295.000		56.241.000		61.199.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	35.416.000	4	39.312.000	4	41.295.000	4	56.241.000	4	61.199.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Surakarta
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.085.408.000		1.204.803.000		1.265.586.000		1.723.628.000		1.875.585.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.085.408.000	4	1.204.803.000	4	1.265.586.000	4	1.723.628.000	4	1.875.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							295.600.000		328.116.000		344.670.000		469.413.000		510.797.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	295.600.000	4	328.116.000	4	344.670.000	4	469.413.000	4	510.797.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							789.808.000		876.687.000		920.916.000		1.254.215.000		1.364.788.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	789.808.000	4	876.687.000	4	920.916.000	4	1.254.215.000	4	1.364.788.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								248.749.000		276.111.000		290.041.000		395.013.000		429.839.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	248.749.000	1	276.111.000	1	290.041.000	1	395.013.000	1	429.839.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							11.704.000		12.991.000		13.647.000		18.586.000		20.225.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	11.704.000	1	12.991.000	1	13.647.000	1	18.586.000	1	20.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							82.459.000		91.529.000		96.147.000		130.945.000		142.489.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	82.459.000	1	91.529.000	1	96.147.000	1	130.945.000	1	142.489.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Operasional atau Lapangan															
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							41.927.000		46.539.000		48.887.000		66.580.000		72.450.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	41.927.000	1	46.539.000	1	48.887.000	1	66.580.000	1	72.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							64.699.000		71.816.000		75.439.000		102.742.000		111.800.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	1	1	64.699.000	1	71.816.000	1	75.439.000	1	102.742.000	1	111.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi *****														
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							38.960.000		43.246.000		45.427.000		61.868.000		67.323.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	38.960.000	1	43.246.000	1	45.427.000	1	61.868.000	1	67.323.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.000.000		9.990.000		10.494.000		14.292.000		15.552.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	9.000.000	1	9.990.000	1	10.494.000	1	14.292.000	1	15.552.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									2.351.284.000		2.609.925.000		2.741.597.000		3.728.455.000		4.057.161.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten ***	%	95	95	95	2.351.284.000	95	2.609.925.000	95	2.741.597.000	95	3.728.455.000	95	4.057.161.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
		X.XX.01.1.02		Administrasi								42.500.000		47.175.000		49.555.000		62.107.000		67.582.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Keuangan Perangkat Daerah ****																	Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	62.107.000	4	67.582.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		62.107.000		67.582.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	62.107.000	4	67.582.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada	Dokumen	4	4	4	10.000.000	4	11.100.000	4	11.660.000	4	15.880.000	4	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						daerah pada perangkat daerah	perangkat daerah ****														
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	10.000.000	4	11.100.000	4	11.660.000	4	15.880.000	4	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								196.603.000		218.229.000		229.240.000		312.205.000		339.730.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	196.603.000	100	218.229.000	100	229.240.000	100	312.205.000	100	339.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							7.150.000		7.937.000		8.337.000		11.354.000		12.355.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.150.000	1	7.937.000	1	8.337.000	1	11.354.000	1	12.355.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							4.921.000		5.462.000		5.738.000		7.815.000		8.503.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.921.000	1	5.462.000	1	5.738.000	1	7.815.000	1	8.503.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.880.000		3.197.000		3.358.000		4.573.000		4.977.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.880.000	1	3.197.000	1	3.358.000	1	4.573.000	1	4.977.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							97.868.000		108.633.000		114.114.000		155.414.000		169.116.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	97.868.000	1	108.633.000	1	114.114.000	1	155.414.000	1	169.116.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							21.100.000		23.421.000		24.603.000		33.507.000		36.461.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	21.100.000	4	23.421.000	4	24.603.000	4	33.507.000	4	36.461.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							62.684.000		69.579.000		73.090.000		99.542.000		108.318.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	62.684.000	4	69.579.000	4	73.090.000	4	99.542.000	4	108.318.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan								1.770.900.000		1.965.699.000		2.064.869.000		2.812.189.000		3.060.116.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****																	Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.770.900.000	4	1.965.699.000	4	2.064.869.000	4	2.812.189.000	4	3.060.116.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							960.000		1.066.000		1.119.000		1.524.000		1.659.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	960.000	4	1.066.000	4	1.119.000	4	1.524.000	4	1.659.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							348.920.000		387.301.000		406.841.000		554.085.000		602.934.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	348.920.000	4	387.301.000	4	406.841.000	4	554.085.000	4	602.934.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							Kantor yang Disediakan *****														
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1.421.020.000		1.577.332.000		1.656.909.000		2.256.580.000		2.455.523.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	1.421.020.000	4	1.577.332.000	4	1.656.909.000	4	2.256.580.000	4	2.455.523.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								331.281.000		367.722.000		386.273.000		526.074.000		572.453.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	331.281.000	1	367.722.000	1	386.273.000	1	526.074.000	1	572.453.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							19.701.000		21.868.000		22.971.000		31.285.000		34.043.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	19.701.000	1	21.868.000	1	22.971.000	1	31.285.000	1	34.043.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa							130.363.000		144.703.000		152.003.000		207.016.000		225.267.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	130.363.000	1	144.703.000	1	152.003.000	1	207.016.000	1	225.267.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							48.491.000		53.825.000		56.541.000		77.004.000		83.792.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	48.491.000	1	53.825.000	1	56.541.000	1	77.004.000	1	83.792.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							1.298.000		1.441.000		1.513.000		2.061.000		2.243.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	1.298.000	1	1.441.000	1	1.513.000	1	2.061.000	1	2.243.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							92.838.000		103.050.000		108.249.000		147.427.000		160.424.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	92.838.000	1	103.050.000	1	108.249.000	1	147.427.000	1	160.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							28.590.000		31.735.000		33.336.000		45.401.000		49.404.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	28.590.000	1	31.735.000	1	33.336.000	1	45.401.000	1	49.404.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.100.000	1	11.660.000	1	15.880.000	1	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN									1.250.410.000		1.387.955.000		1.457.977.000		1.985.312.000		2.160.343.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			TAHAN DAERAH PROVINSI ***																		n Pendapatan Daerah Sragen
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen ***	%	95	95	95	1.250.410.000	95	1.387.955.000	95	1.457.977.000	95	1.985.312.000	95	2.160.343.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.153.000		73.074.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.153.000	4	73.074.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.153.000		73.074.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.153.000	4	73.074.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							i Keuangan SKPD *****														
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Sragen
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								167.440.000		185.858.000		195.234.000		265.894.000		289.337.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	167.440.000	100	185.858.000	100	195.234.000	100	265.894.000	100	289.337.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							3.843.000		4.266.000		4.481.000		6.103.000		6.641.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.843.000	1	4.266.000	1	4.481.000	1	6.103.000	1	6.641.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							30.994.000		34.403.000		36.139.000		49.218.000		53.558.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	30.994.000	1	34.403.000	1	36.139.000	1	49.218.000	1	53.558.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							1.990.000		2.209.000		2.320.000		3.160.000		3.439.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	1.990.000	1	2.209.000	1	2.320.000	1	3.160.000	1	3.439.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.400.000		1.554.000		1.632.000		2.223.000		2.419.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.400.000	4	1.554.000	4	1.632.000	4	2.223.000	4	2.419.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							68.348.000		75.866.000		79.694.000		108.537.000		118.105.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	68.348.000	1	75.866.000	1	79.694.000	1	108.537.000	1	118.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							13.820.000		15.340.000		16.114.000		21.946.000		23.881.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	13.820.000	4	15.340.000	4	16.114.000	4	21.946.000	4	23.881.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							47.045.000		52.220.000		54.854.000		74.707.000		81.294.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	47.045.000	4	52.220.000	4	54.854.000	4	74.707.000	4	81.294.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								777.586.000		863.120.000		906.666.000		1.234.806.000		1.343.668.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	777.586.000	4	863.120.000	4	906.666.000	4	1.234.806.000	4	1.343.668.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.240.000		2.486.000		2.612.000		3.557.000		3.871.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	2.240.000	4	2.486.000	4	2.612.000	4	3.557.000	4	3.871.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							178.300.000		197.913.000		207.898.000		283.140.000		308.102.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	4	4	4	178.300.000	4	197.913.000	4	207.898.000	4	283.140.000	4	308.102.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							597.046.000		662.721.000		696.156.000		948.109.000		1.031.695.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	597.046.000	4	662.721.000	4	696.156.000	4	948.109.000	4	1.031.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								262.884.000		291.802.000		306.522.000		417.459.000		454.264.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	262.884.000	1	291.802.000	1	306.522.000	1	417.459.000	1	454.264.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan							29.922.000		33.213.000		34.889.000		47.516.000		51.705.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****																Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	29.922.000	1	33.213.000	1	34.889.000	1	47.516.000	1	51.705.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								111.541.000		123.811.000		130.057.000		177.127.000		192.743.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	111.541.000	1	123.811.000	1	130.057.000	1	177.127.000	1	192.743.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							24.699.000		27.416.000		28.799.000		39.222.000		42.680.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	24.699.000	1	27.416.000	1	28.799.000	1	39.222.000	1	42.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							3.000.000		3.330.000		3.498.000		4.764.000		5.184.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	3.000.000	1	3.330.000	1	3.498.000	1	4.764.000	1	5.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							56.562.000		62.784.000		65.951.000		89.820.000		97.739.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	56.562.000	1	62.784.000	1	65.951.000	1	89.820.000	1	97.739.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							29.460.000		32.701.000		34.350.000		46.782.000		50.907.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	29.460.000	1	32.701.000	1	34.350.000	1	46.782.000	1	50.907.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							7.700.000		8.547.000		8.978.000		12.228.000		13.306.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					atau Bangunan Lainnya *****																Pendapatan Daerah Sragen
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	7.700.000	1	8.547.000	1	8.978.000	1	12.228.000	1	13.306.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.551.724.000		1.722.414.000		1.809.311.000		2.463.376.000		2.680.550.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo ***	%	95	95	95	1.551.724.000	95	1.722.414.000	95	1.809.311.000	95	2.463.376.000	95	2.680.550.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		66.728.000		72.611.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	66.728.000	4	72.611.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		66.728.000		72.611.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	66.728.000	4	72.611.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								172.436.000		191.404.000		201.060.000		273.830.000		297.969.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	172.436.000	100	191.404.000	100	201.060.000	100	273.830.000	100	297.969.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							6.054.000		6.720.000		7.059.000		9.614.000		10.461.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.054.000	1	6.720.000	1	7.059.000	1	9.614.000	1	10.461.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							34.430.000		38.217.000		40.145.000		54.675.000		59.495.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	34.430.000	1	38.217.000	1	40.145.000	1	54.675.000	1	59.495.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							9.030.000		10.023.000		10.529.000		14.340.000		15.604.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	9.030.000	1	10.023.000	1	10.529.000	1	14.340.000	1	15.604.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							2.100.000		2.331.000		2.449.000		3.335.000		3.629.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	2.100.000	4	2.331.000	4	2.449.000	4	3.335.000	4	3.629.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							70.852.000		78.646.000		82.613.000		112.513.000		122.432.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	70.852.000	1	78.646.000	1	82.613.000	1	112.513.000	1	122.432.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							10.790.000		11.977.000		12.581.000		17.135.000		18.645.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	10.790.000	1	11.977.000	1	12.581.000	1	17.135.000	1	18.645.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							39.180.000		43.490.000		45.684.000		62.218.000		67.703.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	39.180.000	4	43.490.000	4	45.684.000	4	62.218.000	4	67.703.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.050.193.000		1.165.715.000		1.224.525.000		1.667.706.000		1.814.734.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.050.193.000	4	1.165.715.000	4	1.224.525.000	4	1.667.706.000	4	1.814.734.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.450.000		2.720.000		2.857.000		3.891.000		4.234.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	2.450.000	4	2.720.000	4	2.857.000	4	3.891.000	4	4.234.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							254.400.000		282.384.000		296.630.000		403.987.000		439.603.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	254.400.000	4	282.384.000	4	296.630.000	4	403.987.000	4	439.603.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							86.647.000		96.178.000		101.030.000		137.595.000		149.726.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	86.647.000	4	96.178.000	4	101.030.000	4	137.595.000	4	149.726.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							706.696.000		784.433.000		824.008.000		1.122.233.000		1.221.171.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	706.696.000	4	784.433.000	4	824.008.000	4	1.122.233.000	4	1.221.171.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang								286.595.000		318.120.000		334.171.000		455.112.000		495.236.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Urusan Pemerintahan Daerah ****																	Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	286.595.000	1	318.120.000	1	334.171.000	1	455.112.000	1	495.236.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							34.480.000		38.273.000		40.204.000		54.754.000		59.581.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	34.480.000	1	38.273.000	1	40.204.000	1	54.754.000	1	59.581.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							97.720.000		108.469.000		113.942.000		155.179.000		168.860.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	97.720.000	1	108.469.000	1	113.942.000	1	155.179.000	1	168.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							44.700.000		49.617.000		52.120.000		70.984.000		77.242.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	44.700.000	1	49.617.000	1	52.120.000	1	70.984.000	1	77.242.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							4.795.000		5.322.000		5.591.000		7.614.000		8.286.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	4.795.000	1	5.322.000	1	5.591.000	1	7.614.000	1	8.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							79.600.000		88.356.000		92.814.000		126.405.000		137.549.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	79.600.000	1	88.356.000	1	92.814.000	1	126.405.000	1	137.549.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor							17.300.000		19.203.000		20.172.000		27.472.000		29.894.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					atau Bangunan Lainnya *****																n Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	17.300.000	1	19.203.000	1	20.172.000	1	27.472.000	1	29.894.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							8.000.000		8.880.000		9.328.000		12.704.000		13.824.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	8.000.000	1	8.880.000	1	9.328.000	1	12.704.000	1	13.824.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									2.082.781.000		2.311.887.000		2.428.522.000		3.306.884.000		3.598.423.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri ***	%	95	95	95	2.082.781.000	95	2.311.887.000	95	2.428.522.000	95	3.306.884.000	95	3.598.423.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		66.918.000		72.818.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	66.918.000	4	72.818.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		66.918.000		72.818.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	66.918.000	4	72.818.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								179.101.000		198.802.000		208.831.000		284.412.000		309.486.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	179.101.000	100	198.802.000	100	208.831.000	100	284.412.000	100	309.486.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							9.608.000		10.665.000		11.203.000		15.258.000		16.603.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	9.608.000	1	10.665.000	1	11.203.000	1	15.258.000	1	16.603.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							34.451.000		38.241.000		40.170.000		54.708.000		59.531.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	34.451.000	1	38.241.000	1	40.170.000	1	54.708.000	1	59.531.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							4.810.000		5.339.000		5.608.000		7.638.000		8.312.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1	1	4.810.000	1	5.339.000	1	5.608.000	1	7.638.000	1	8.312.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							yang Disediakan *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							900.000		999.000		1.049.000		1.429.000		1.555.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	900.000	4	999.000	4	1.049.000	4	1.429.000	4	1.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							56.730.000		62.970.000		66.147.000		90.087.000		98.029.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	56.730.000	1	62.970.000	1	66.147.000	1	90.087.000	1	98.029.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							7.300.000		8.103.000		8.512.000		11.592.000		12.614.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	7.300.000	4	8.103.000	4	8.512.000	4	11.592.000	4	12.614.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							65.302.000		72.485.000		76.142.000		103.700.000		112.842.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Laporan	4	4	4	65.302.000	4	72.485.000	4	76.142.000	4	103.700.000	4	112.842.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan								1.493.849.000		1.658.172.000		1.741.828.000		2.372.232.000		2.581.371.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Daerah ****																	n Daerah Wonogiri
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.493.849.000	4	1.658.172.000	4	1.741.828.000	4	2.372.232.000	4	2.581.371.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.890.000		3.208.000		3.370.000		4.589.000		4.994.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	2.890.000	4	3.208.000	4	3.370.000	4	4.589.000	4	4.994.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							307.400.000		341.214.000		358.428.000		488.151.000		531.187.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	307.400.000	4	341.214.000	4	358.428.000	4	488.151.000	4	531.187.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							36.000.000		39.960.000		41.976.000		57.168.000		62.208.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	36.000.000	4	39.960.000	4	41.976.000	4	57.168.000	4	62.208.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1.147.559.000		1.273.790.000		1.338.054.000		1.822.324.000		1.982.982.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	1.147.559.000	4	1.273.790.000	4	1.338.054.000	4	1.822.324.000	4	1.982.982.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								367.331.000		407.738.000		428.308.000		583.322.000		634.748.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	367.331.000	1	407.738.000	1	428.308.000	1	583.322.000	1	634.748.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							27.253.000		30.251.000		31.777.000		43.278.000		47.093.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	27.253.000	1	30.251.000	1	31.777.000	1	43.278.000	1	47.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan							154.100.000		171.051.000		179.681.000		244.711.000		266.285.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Dinas Operasional atau Lapangan *****																n Daerah Wonogiri
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	154.100.000	1	171.051.000	1	179.681.000	1	244.711.000	1	266.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							48.350.000		53.669.000		56.376.000		76.780.000		83.549.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	48.350.000	1	53.669.000	1	56.376.000	1	76.780.000	1	83.549.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor							86.128.000		95.602.000		100.425.000		136.771.000		148.829.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					dan Bangunan Lainnya *****																Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	86.128.000	1	95.602.000	1	100.425.000	1	136.771.000	1	148.829.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							40.000.000		44.400.000		46.640.000		63.520.000		69.120.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	40.000.000	1	44.400.000	1	46.640.000	1	63.520.000	1	69.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							11.500.000		12.765.000		13.409.000		18.262.000		19.872.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	11.500.000	1	12.765.000	1	13.409.000	1	18.262.000	1	19.872.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.494.523.000		1.658.921.000		1.742.613.000		2.373.302.000		2.582.536.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar ***	%	95	95	95	1.494.523.000	95	1.658.921.000	95	1.742.613.000	95	2.373.302.000	95	2.582.536.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								43.360.000		48.130.000		50.558.000		68.856.000		74.926.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	43.360.000	4	48.130.000	4	50.558.000	4	68.856.000	4	74.926.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							43.360.000		48.130.000		50.558.000		68.856.000		74.926.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	43.360.000	4	48.130.000	4	50.558.000	4	68.856.000	4	74.926.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							i Keuangan SKPD *****														
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								178.114.000		197.707.000		207.680.000		282.844.000		307.782.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	178.114.000	100	197.707.000	100	207.680.000	100	282.844.000	100	307.782.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							3.266.000		3.625.000		3.808.000		5.186.000		5.644.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.266.000	1	3.625.000	1	3.808.000	1	5.186.000	1	5.644.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							Kantor yang Disediakan *****														
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							33.748.000		37.460.000		39.350.000		53.592.000		58.317.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	33.748.000	1	37.460.000	1	39.350.000	1	53.592.000	1	58.317.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							4.710.000		5.228.000		5.492.000		7.479.000		8.139.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.710.000	1	5.228.000	1	5.492.000	1	7.479.000	1	8.139.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							900.000		999.000		1.049.000		1.429.000		1.555.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	900.000	4	999.000	4	1.049.000	4	1.429.000	4	1.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							63.334.000		70.301.000		73.847.000		100.574.000		109.441.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Karanganyar
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	63.334.000	1	70.301.000	1	73.847.000	1	100.574.000	1	109.441.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							8.250.000		9.158.000		9.620.000		13.101.000		14.256.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	8.250.000	4	9.158.000	4	9.620.000	4	13.101.000	4	14.256.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							63.906.000		70.936.000		74.514.000		101.483.000		110.430.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	63.906.000	4	70.936.000	4	74.514.000	4	101.483.000	4	110.430.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunja								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				ng Urusan Pemerintah Daerah ****																	n Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.024.420.000		1.137.106.000		1.194.474.000		1.626.779.000		1.770.198.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.024.420.000	4	1.137.106.000	4	1.194.474.000	4	1.626.779.000	4	1.770.198.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							920.000		1.021.000		1.073.000		1.461.000		1.590.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	4	4	4	920.000	4	1.021.000	4	1.073.000	4	1.461.000	4	1.590.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							Surat Menyurat *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							200.500.000		222.555.000		233.783.000		318.394.000		346.464.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	200.500.000	4	222.555.000	4	233.783.000	4	318.394.000	4	346.464.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							823.000.000		913.530.000		959.618.000		1.306.924.000		1.422.144.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	823.000.000	4	913.530.000	4	959.618.000	4	1.306.924.000	4	1.422.144.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang								248.629.000		275.978.000		289.901.000		394.823.000		429.630.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Urusan Pemerintahan Daerah ****																	Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	248.629.000	1	275.978.000	1	289.901.000	1	394.823.000	1	429.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							0		0		0		0		0		Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							131.547.000		146.017.000		153.384.000		208.897.000		227.313.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	131.547.000	1	146.017.000	1	153.384.000	1	208.897.000	1	227.313.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							32.929.000		36.551.000		38.395.000		52.291.000		56.901.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	32.929.000	1	36.551.000	1	38.395.000	1	52.291.000	1	56.901.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							52.627.000		58.416.000		61.363.000		83.572.000		90.939.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	52.627.000	1	58.416.000	1	61.363.000	1	83.572.000	1	90.939.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi							24.526.000		27.224.000		28.597.000		38.947.000		42.381.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	24.526.000	1	27.224.000	1	28.597.000	1	38.947.000	1	42.381.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							7.000.000		7.770.000		8.162.000		11.116.000		12.096.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	7.000.000	1	7.770.000	1	8.162.000	1	11.116.000	1	12.096.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.410.417.000		1.565.564.000		1.644.547.000		2.239.742.000		2.437.202.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali ***	%	95	95	95	1.410.417.000	95	1.565.564.000	95	1.644.547.000	95	2.239.742.000	95	2.437.202.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan								42.900.000		47.619.000		50.021.000		68.125.000		74.131.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Perangkat Daerah ****																	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.900.000	4	47.619.000	4	50.021.000	4	68.125.000	4	74.131.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.900.000		47.619.000		50.021.000		68.125.000		74.131.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.900.000	4	47.619.000	4	50.021.000	4	68.125.000	4	74.131.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								164.396.000		182.481.000		191.687.000		261.061.000		284.077.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Meningkatnya kualitas layanan	Persentase layanan administrasi umum	%	100	100	100	164.396.000	100	182.481.000	100	191.687.000	100	261.061.000	100	284.077.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						administrasi umum perangkat daerah	perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.250.000		5.828.000		6.122.000		8.337.000		9.072.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.250.000	1	5.828.000	1	6.122.000	1	8.337.000	1	9.072.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							24.325.000		27.001.000		28.363.000		38.628.000		42.034.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	24.325.000	1	27.001.000	1	28.363.000	1	38.628.000	1	42.034.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							15.500.000		17.205.000		18.073.000		24.614.000		26.784.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	15.500.000	1	17.205.000	1	18.073.000	1	24.614.000	1	26.784.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.070.000		1.188.000		1.248.000		1.699.000		1.849.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.070.000	4	1.188.000	4	1.248.000	4	1.699.000	4	1.849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							51.571.000		57.244.000		60.132.000		81.895.000		89.115.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	51.571.000	1	57.244.000	1	60.132.000	1	81.895.000	1	89.115.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							9.675.000		10.739.000		11.281.000		15.364.000		16.718.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	9.675.000	4	10.739.000	4	11.281.000	4	15.364.000	4	16.718.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							57.005.000		63.276.000		66.468.000		90.524.000		98.505.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Boyolali
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	57.005.000	4	63.276.000	4	66.468.000	4	90.524.000	4	98.505.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunja								892.870.000		991.086.000		1.041.087.000		1.417.878.000		1.542.880.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				ng Urusan Pemerintahan Daerah ****																	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	892.870.000	4	991.086.000	4	1.041.087.000	4	1.417.878.000	4	1.542.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.700.000		1.887.000		1.982.000		2.700.000		2.938.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.700.000	4	1.887.000	4	1.982.000	4	2.700.000	4	2.938.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							154.920.000		171.961.000		180.637.000		246.013.000		267.702.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	154.920.000	4	171.961.000	4	180.637.000	4	246.013.000	4	267.702.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							736.250.000		817.238.000		858.468.000		1.169.165.000		1.272.240.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	736.250.000	4	817.238.000	4	858.468.000	4	1.169.165.000	4	1.272.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								310.251.000		344.378.000		361.752.000		492.678.000		536.114.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	310.251.000	1	344.378.000	1	361.752.000	1	492.678.000	1	536.114.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							25.035.000		27.789.000		29.191.000		39.756.000		43.260.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	25.035.000	1	27.789.000	1	29.191.000	1	39.756.000	1	43.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya							182.504.000		202.579.000		212.800.000		289.816.000		315.367.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****																Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	182.504.000	1	202.579.000	1	212.800.000	1	289.816.000	1	315.367.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							29.460.000		32.701.000		34.350.000		46.782.000		50.907.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	29.460.000	1	32.701.000	1	34.350.000	1	46.782.000	1	50.907.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							1.477.000		1.639.000		1.722.000		2.345.000		2.552.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	1.477.000	1	1.639.000	1	1.722.000	1	2.345.000	1	2.552.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							45.935.000		50.988.000		53.560.000		72.945.000		79.376.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	45.935.000	1	50.988.000	1	53.560.000	1	72.945.000	1	79.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							19.840.000		22.022.000		23.133.000		31.506.000		34.284.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	19.840.000	1	22.022.000	1	23.133.000	1	31.506.000	1	34.284.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							6.000.000		6.660.000		6.996.000		9.528.000		10.368.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	6.000.000	1	6.660.000	1	6.996.000	1	9.528.000	1	10.368.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									1.539.123.000		1.708.428.000		1.794.618.000		2.444.128.000		2.659.605.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			PROVINSI ***																		n Daerah Pati
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati ***	%	95	95	95	1.539.123.000	95	1.708.428.000	95	1.794.618.000	95	2.444.128.000	95	2.659.605.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.456.000		47.126.000		49.504.000		67.420.000		73.364.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.456.000	4	47.126.000	4	49.504.000	4	67.420.000	4	73.364.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.456.000		47.126.000		49.504.000		67.420.000		73.364.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.456.000	4	47.126.000	4	49.504.000	4	67.420.000	4	73.364.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								20.000.000		22.200.000		23.320.000		31.760.000		34.560.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	20.000.000	4	22.200.000	4	23.320.000	4	31.760.000	4	34.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							20.000.000		22.200.000		23.320.000		31.760.000		34.560.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	20.000.000	4	22.200.000	4	23.320.000	4	31.760.000	4	34.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								191.716.000		212.806.000		223.541.000		304.445.000		331.285.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	191.716.000	100	212.806.000	100	223.541.000	100	304.445.000	100	331.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							3.000.000		3.330.000		3.498.000		4.764.000		5.184.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	3.330.000	1	3.498.000	1	4.764.000	1	5.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							45.100.000		50.061.000		52.587.000		71.619.000		77.933.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	45.100.000	1	50.061.000	1	52.587.000	1	71.619.000	1	77.933.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							4.223.000		4.688.000		4.924.000		6.706.000		7.297.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.223.000	1	4.688.000	1	4.924.000	1	6.706.000	1	7.297.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.800.000		1.998.000		2.099.000		2.858.000		3.110.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.800.000	4	1.998.000	4	2.099.000	4	2.858.000	4	3.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							50.033.000		55.537.000		58.338.000		79.452.000		86.457.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	50.033.000	1	55.537.000	1	58.338.000	1	79.452.000	1	86.457.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							18.950.000		21.035.000		22.096.000		30.093.000		32.746.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	18.950.000	4	21.035.000	4	22.096.000	4	30.093.000	4	32.746.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							67.610.000		75.047.000		78.833.000		107.365.000		116.830.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	67.610.000	4	75.047.000	4	78.833.000	4	107.365.000	4	116.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							1.000.000		1.110.000		1.166.000		1.588.000		1.728.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	1.000.000	4	1.110.000	4	1.166.000	4	1.588.000	4	1.728.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan							0		0		0		0		0	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Mesin Lainnya *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.008.761.000		1.119.725.000		1.176.215.000		1.601.913.000		1.743.139.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.008.761.000	4	1.119.725.000	4	1.176.215.000	4	1.601.913.000	4	1.743.139.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.020.000		1.132.000		1.189.000		1.620.000		1.763.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.020.000	4	1.132.000	4	1.189.000	4	1.620.000	4	1.763.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							272.160.000		302.098.000		317.339.000		432.190.000		470.292.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	272.160.000	4	302.098.000	4	317.339.000	4	432.190.000	4	470.292.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							735.581.000		816.495.000		857.687.000		1.168.103.000		1.271.084.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	735.581.000	4	816.495.000	4	857.687.000	4	1.168.103.000	4	1.271.084.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								276.190.000		306.571.000		322.038.000		438.590.000		477.257.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	276.190.000	1	306.571.000	1	322.038.000	1	438.590.000	1	477.257.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****																n Daerah Pati
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							150.450.000		167.000.000		175.425.000		238.915.000		259.978.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	150.450.000	1	167.000.000	1	175.425.000	1	238.915.000	1	259.978.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							55.690.000		61.816.000		64.935.000		88.436.000		96.232.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	1	1	55.690.000	1	61.816.000	1	64.935.000	1	88.436.000	1	96.232.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Peralatan dan Mesin Lainnya	yang Dipelihara *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							12.000.000		13.320.000		13.992.000		19.056.000		20.736.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	12.000.000	1	13.320.000	1	13.992.000	1	19.056.000	1	20.736.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							32.810.000		36.419.000		38.256.000		52.102.000		56.696.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	32.810.000	1	36.419.000	1	38.256.000	1	52.102.000	1	56.696.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							10.240.000		11.366.000		11.940.000		16.261.000		17.695.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.240.000	1	11.366.000	1	11.940.000	1	16.261.000	1	17.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							15.000.000		16.650.000		17.490.000		23.820.000		25.920.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	15.000.000	1	16.650.000	1	17.490.000	1	23.820.000	1	25.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.683.620.000		1.868.820.000		1.963.102.000		2.673.587.000		2.909.295.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora ***	%	95	95	95	1.683.620.000	95	1.868.820.000	95	1.963.102.000	95	2.673.587.000	95	2.909.295.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.490.000		73.440.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.490.000	4	73.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.490.000		73.440.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.490.000	4	73.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	10.000.000	4	11.100.000	4	11.660.000	4	15.880.000	4	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	10.000.000	4	11.100.000	4	11.660.000	4	15.880.000	4	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Meningkatnya layanan	Persentase layanan administrasi	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						administrasi kepegawaian perangkat daerah	kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								169.759.000		188.433.000		197.940.000		269.576.000		293.343.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	169.759.000	100	188.433.000	100	197.940.000	100	269.576.000	100	293.343.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							10.686.000		11.861.000		12.460.000		16.969.000		18.465.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.686.000	1	11.861.000	1	12.460.000	1	16.969.000	1	18.465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							35.407.000		39.302.000		41.285.000		56.226.000		61.183.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	35.407.000	1	39.302.000	1	41.285.000	1	56.226.000	1	61.183.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							7.409.000		8.224.000		8.639.000		11.765.000		12.803.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.409.000	1	8.224.000	1	8.639.000	1	11.765.000	1	12.803.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							552.000		613.000		644.000		877.000		954.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	552.000	4	613.000	4	644.000	4	877.000	4	954.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							53.732.000		59.643.000		62.652.000		85.326.000		92.849.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	53.732.000	1	59.643.000	1	62.652.000	1	85.326.000	1	92.849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							11.025.000		12.238.000		12.855.000		17.508.000		19.051.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	11.025.000	4	12.238.000	4	12.855.000	4	17.508.000	4	19.051.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							50.948.000		56.552.000		59.405.000		80.905.000		88.038.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	50.948.000	4	56.552.000	4	59.405.000	4	80.905.000	4	88.038.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunja								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				ng Urusan Pemerintah Daerah ****																	n Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.160.761.000		1.288.445.000		1.353.447.000		1.843.288.000		2.005.795.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.160.761.000	4	1.288.445.000	4	1.353.447.000	4	1.843.288.000	4	2.005.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.920.000		2.131.000		2.239.000		3.049.000		3.318.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.920.000	4	2.131.000	4	2.239.000	4	3.049.000	4	3.318.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							204.300.000		226.773.000		238.214.000		324.428.000		353.030.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	204.300.000	4	226.773.000	4	238.214.000	4	324.428.000	4	353.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							3.280.000		3.641.000		3.824.000		5.209.000		5.668.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	3.280.000	4	3.641.000	4	3.824.000	4	5.209.000	4	5.668.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							951.261.000		1.055.900.000		1.109.170.000		1.510.602.000		1.643.779.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	951.261.000	4	1.055.900.000	4	1.109.170.000	4	1.510.602.000	4	1.643.779.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								300.600.000		333.667.000		350.500.000		477.353.000		519.437.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	300.600.000	1	333.667.000	1	350.500.000	1	477.353.000	1	519.437.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							17.904.000		19.873.000		20.876.000		28.432.000		30.938.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	17.904.000	1	19.873.000	1	20.876.000	1	28.432.000	1	30.938.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							110.116.000		122.229.000		128.395.000		174.864.000		190.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	110.116.000	1	122.229.000	1	128.395.000	1	174.864.000	1	190.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							38.505.000		42.741.000		44.897.000		61.146.000		66.537.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	38.505.000	1	42.741.000	1	44.897.000	1	61.146.000	1	66.537.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.100.000	1	11.660.000	1	15.880.000	1	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							95.325.000		105.811.000		111.149.000		151.376.000		164.722.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	95.325.000	1	105.811.000	1	111.149.000	1	151.376.000	1	164.722.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							20.750.000		23.033.000		24.195.000		32.951.000		35.856.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	20.750.000	1	23.033.000	1	24.195.000	1	32.951.000	1	35.856.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							8.000.000		8.880.000		9.328.000		12.704.000		13.824.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	8.000.000	1	8.880.000	1	9.328.000	1	12.704.000	1	13.824.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.092.063.000		1.212.191.000		1.273.346.000		1.733.623.000		1.886.461.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang ***	%	95	95	95	1.092.063.000	95	1.212.191.000	95	1.273.346.000	95	1.733.623.000	95	1.886.461.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		66.918.000		72.818.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Meningkatnya layanan administrasi	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	66.918.000	4	72.818.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						keuangan perangkat daerah	perangkat daerah yang disusun ****														
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		66.918.000		72.818.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	66.918.000	4	72.818.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	10.000.000	4	11.100.000	4	11.660.000	4	15.880.000	4	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	10.000.000	4	11.100.000	4	11.660.000	4	15.880.000	4	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								137.840.000		153.003.000		160.721.000		218.890.000		238.187.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	137.840.000	100	153.003.000	100	160.721.000	100	218.890.000	100	238.187.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan							4.201.000		4.663.000		4.898.000		6.671.000		7.259.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Bangunan Kantor *****																n Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.201.000	1	4.663.000	1	4.898.000	1	6.671.000	1	7.259.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							26.478.000		29.391.000		30.873.000		42.047.000		45.754.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	26.478.000	1	29.391.000	1	30.873.000	1	42.047.000	1	45.754.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.999.000		3.329.000		3.497.000		4.762.000		5.182.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.999.000	1	3.329.000	1	3.497.000	1	4.762.000	1	5.182.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan							1.200.000		1.332.000		1.399.000		1.906.000		2.074.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Perundang-Undangan *****																Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.200.000	4	1.332.000	4	1.399.000	4	1.906.000	4	2.074.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							51.150.000		56.777.000		59.641.000		81.226.000		88.387.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	51.150.000	1	56.777.000	1	59.641.000	1	81.226.000	1	88.387.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							9.600.000		10.656.000		11.194.000		15.245.000		16.589.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	9.600.000	4	10.656.000	4	11.194.000	4	15.245.000	4	16.589.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							42.212.000		46.855.000		49.219.000		67.033.000		72.942.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	42.212.000	4	46.855.000	4	49.219.000	4	67.033.000	4	72.942.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					pada SKPD *****																n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								656.908.000		729.168.000		765.955.000		1.043.170.000		1.135.137.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Laporan	4	4	4	656.908.000	4	729.168.000	4	765.955.000	4	1.043.170.000	4	1.135.137.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						dengan kebutuhan perangkat daerah	daerah yang disusun ****														
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.921.000		2.132.000		2.240.000		3.051.000		3.319.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.921.000	4	2.132.000	4	2.240.000	4	3.051.000	4	3.319.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							151.500.000		168.165.000		176.649.000		240.582.000		261.792.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	151.500.000	4	168.165.000	4	176.649.000	4	240.582.000	4	261.792.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							20.000.000		22.200.000		23.320.000		31.760.000		34.560.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	20.000.000	4	22.200.000	4	23.320.000	4	31.760.000	4	34.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							483.487.000		536.671.000		563.746.000		767.777.000		835.466.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	483.487.000	4	536.671.000	4	563.746.000	4	767.777.000	4	835.466.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								244.815.000		271.745.000		285.455.000		388.765.000		423.039.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	244.815.000	1	271.745.000	1	285.455.000	1	388.765.000	1	423.039.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							18.445.000		20.474.000		21.507.000		29.291.000		31.873.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	18.445.000	1	20.474.000	1	21.507.000	1	29.291.000	1	31.873.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							118.919.000		132.000.000		138.660.000		188.843.000		205.492.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1	1	1	118.919.000	1	132.000.000	1	138.660.000	1	188.843.000	1	205.492.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****															TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							30.087.000		33.397.000		35.081.000		47.778.000		51.990.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	30.087.000	1	33.397.000	1	35.081.000	1	47.778.000	1	51.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	5.550.000	1	5.830.000	1	7.940.000	1	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							49.800.000		55.278.000		58.067.000		79.082.000		86.054.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	49.800.000	1	55.278.000	1	58.067.000	1	79.082.000	1	86.054.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.764.000		16.388.000		17.215.000		23.445.000		25.512.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	14.764.000	1	16.388.000	1	17.215.000	1	23.445.000	1	25.512.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							7.800.000		8.658.000		9.095.000		12.386.000		13.478.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	7.800.000	1	8.658.000	1	9.095.000	1	12.386.000	1	13.478.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.466.520.000		1.627.838.000		1.709.962.000		2.314.066.000		2.518.079.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus ***	%	95	95	95	1.466.520.000	95	1.627.838.000	95	1.709.962.000	95	2.314.066.000	95	2.518.079.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Kudus
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		52.722.000		57.370.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	52.722.000	4	57.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		52.722.000		57.370.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	52.722.000	4	57.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								6.700.000		7.437.000		7.812.000		10.640.000		11.578.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	6.700.000	4	7.437.000	4	7.812.000	4	10.640.000	4	11.578.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							6.700.000		7.437.000		7.812.000		10.640.000		11.578.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	6.700.000	4	7.437.000	4	7.812.000	4	10.640.000	4	11.578.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat								187.317.000		207.922.000		218.412.000		297.459.000		323.685.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Daerah ****																	Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	187.317.000	100	207.922.000	100	218.412.000	100	297.459.000	100	323.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.000.000	1	11.100.000	1	11.660.000	1	15.880.000	1	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							35.000.000		38.850.000		40.810.000		55.580.000		60.480.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	35.000.000	1	38.850.000	1	40.810.000	1	55.580.000	1	60.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang							9.950.000		11.045.000		11.602.000		15.801.000		17.194.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Cetakan dan Penggandaan *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	9.950.000	1	11.045.000	1	11.602.000	1	15.801.000	1	17.194.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							2.400.000		2.664.000		2.798.000		3.811.000		4.147.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	2.400.000	4	2.664.000	4	2.798.000	4	3.811.000	4	4.147.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							67.601.000		75.037.000		78.823.000		107.350.000		116.815.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	67.601.000	1	75.037.000	1	78.823.000	1	107.350.000	1	116.815.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							12.884.000		14.301.000		15.023.000		20.460.000		22.264.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	12.884.000	4	14.301.000	4	15.023.000	4	20.460.000	4	22.264.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							46.982.000		52.150.000		54.781.000		74.607.000		81.185.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	46.982.000	4	52.150.000	4	54.781.000	4	74.607.000	4	81.185.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							2.500.000		2.775.000		2.915.000		3.970.000		4.320.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	2.500.000	4	2.775.000	4	2.915.000	4	3.970.000	4	4.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								852.737.000		946.538.000		994.291.000		1.354.146.000		1.473.530.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	852.737.000	4	946.538.000	4	994.291.000	4	1.354.146.000	4	1.473.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.281.000		1.422.000		1.494.000		2.034.000		2.214.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.281.000	4	1.422.000	4	1.494.000	4	2.034.000	4	2.214.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							202.200.000		224.442.000		235.765.000		321.094.000		349.402.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	202.200.000	4	224.442.000	4	235.765.000	4	321.094.000	4	349.402.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							1.230.000		1.365.000		1.434.000		1.953.000		2.125.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	1.230.000	N/A	1.365.000	N/A	1.434.000	N/A	1.953.000	N/A	2.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							648.026.000		719.309.000		755.598.000		1.029.065.000		1.119.789.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	648.026.000	4	719.309.000	4	755.598.000	4	1.029.065.000	4	1.119.789.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								377.266.000		418.766.000		439.892.000		599.099.000		651.916.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	377.266.000	1	418.766.000	1	439.892.000	1	599.099.000	1	651.916.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							22.226.000		24.671.000		25.916.000		35.295.000		38.407.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	1	1	1	22.226.000	1	24.671.000	1	25.916.000	1	35.295.000	1	38.407.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****															TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							133.599.000		148.295.000		155.776.000		212.155.000		230.859.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	133.599.000	1	148.295.000	1	155.776.000	1	212.155.000	1	230.859.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							49.110.000		54.512.000		57.262.000		77.987.000		84.862.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	49.110.000	1	54.512.000	1	57.262.000	1	77.987.000	1	84.862.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							24.000.000		26.640.000		27.984.000		38.112.000		41.472.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	24.000.000	1	26.640.000	1	27.984.000	1	38.112.000	1	41.472.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							100.105.000		111.117.000		116.722.000		158.967.000		172.981.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	100.105.000	1	111.117.000	1	116.722.000	1	158.967.000	1	172.981.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							40.226.000		44.651.000		46.904.000		63.879.000		69.511.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	40.226.000	1	44.651.000	1	46.904.000	1	63.879.000	1	69.511.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							8.000.000		8.880.000		9.328.000		12.704.000		13.824.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	8.000.000	1	8.880.000	1	9.328.000	1	12.704.000	1	13.824.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.566.253.000		1.738.542.000		1.826.251.000		2.486.735.000		2.705.968.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara ***	%	95	95	95	1.566.253.000	95	1.738.542.000	95	1.826.251.000	95	2.486.735.000	95	2.705.968.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Jepara
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Kepegawaian *****																n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								150.799.000		167.388.000		175.832.000		239.469.000		260.581.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	150.799.000	100	167.388.000	100	175.832.000	100	239.469.000	100	260.581.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							3.941.000		4.375.000		4.595.000		6.258.000		6.810.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.941.000	1	4.375.000	1	4.595.000	1	6.258.000	1	6.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							28.998.000		32.188.000		33.812.000		46.049.000		50.109.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	28.998.000	1	32.188.000	1	33.812.000	1	46.049.000	1	50.109.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.000.000	1	11.100.000	1	11.660.000	1	15.880.000	1	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.500.000		1.665.000		1.749.000		2.382.000		2.592.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.500.000	4	1.665.000	4	1.749.000	4	2.382.000	4	2.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							48.240.000		53.546.000		56.248.000		76.605.000		83.359.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	Paket	1	1	1	48.240.000	1	53.546.000	1	56.248.000	1	76.605.000	1	83.359.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							yang Disediakan *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							8.260.000		9.169.000		9.631.000		13.117.000		14.273.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	8.260.000	4	9.169.000	4	9.631.000	4	13.117.000	4	14.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							49.860.000		55.345.000		58.137.000		79.178.000		86.158.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	49.860.000	4	55.345.000	4	58.137.000	4	79.178.000	4	86.158.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.049.505.000		1.164.950.000		1.223.723.000		1.666.614.000		1.813.545.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.049.505.000	4	1.164.950.000	4	1.223.723.000	4	1.666.614.000	4	1.813.545.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.530.000		1.698.000		1.784.000		2.430.000		2.644.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.530.000	4	1.698.000	4	1.784.000	4	2.430.000	4	2.644.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							311.000.000		345.210.000		362.626.000		493.868.000		537.408.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	311.000.000	4	345.210.000	4	362.626.000	4	493.868.000	4	537.408.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							736.975.000		818.042.000		859.313.000		1.170.316.000		1.273.493.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	736.975.000	4	818.042.000	4	859.313.000	4	1.170.316.000	4	1.273.493.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								323.449.000		359.029.000		377.141.000		513.638.000		558.920.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	Unit	1	1	1	323.449.000	1	359.029.000	1	377.141.000	1	513.638.000	1	558.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							dilakukan pemeliharaan ****														
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							16.044.000		17.809.000		18.707.000		25.478.000		27.724.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	16.044.000	1	17.809.000	1	18.707.000	1	25.478.000	1	27.724.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								149.387.000		165.820.000		174.185.000		237.227.000		258.141.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	149.387.000	1	165.820.000	1	174.185.000	1	237.227.000	1	258.141.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan							43.728.000		48.538.000		50.987.000		69.440.000		75.562.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Mesin Lainnya *****																n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	43.728.000	1	48.538.000	1	50.987.000	1	69.440.000	1	75.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		55.500.000		58.300.000		79.400.000		86.400.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	55.500.000	1	58.300.000	1	79.400.000	1	86.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							56.290.000		62.482.000		65.634.000		89.389.000		97.269.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	56.290.000	1	62.482.000	1	65.634.000	1	89.389.000	1	97.269.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							8.000.000		8.880.000		9.328.000		12.704.000		13.824.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	8.000.000	1	8.880.000	1	9.328.000	1	12.704.000	1	13.824.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.405.028.000		1.559.582.000		1.638.263.000		2.218.796.000		2.414.411.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan ***	%	95	95	95	1.405.028.000	95	1.559.582.000	95	1.638.263.000	95	2.218.796.000	95	2.414.411.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		55.104.000		59.962.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	55.104.000	4	59.962.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi							42.500.000		47.175.000		49.555.000		55.104.000		59.962.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pelaksanaan Tugas ASN *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	55.104.000	4	59.962.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								9.880.000		10.967.000		11.520.000		15.689.000		17.073.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	9.880.000	4	10.967.000	4	11.520.000	4	15.689.000	4	17.073.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							9.880.000		10.967.000		11.520.000		15.689.000		17.073.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	9.880.000	4	10.967.000	4	11.520.000	4	15.689.000	4	17.073.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								152.358.000		169.119.000		177.650.000		241.944.000		263.274.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	152.358.000	100	169.119.000	100	177.650.000	100	241.944.000	100	263.274.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi							7.686.000		8.531.000		8.962.000		12.205.000		13.281.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****																n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.686.000	1	8.531.000	1	8.962.000	1	12.205.000	1	13.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							21.470.000		23.832.000		25.034.000		34.094.000		37.100.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	21.470.000	1	23.832.000	1	25.034.000	1	34.094.000	1	37.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.006.000		3.337.000		3.505.000		4.774.000		5.194.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1	1	3.006.000	1	3.337.000	1	3.505.000	1	4.774.000	1	5.194.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							yang Disediakan *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							950.000		1.055.000		1.108.000		1.509.000		1.642.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	950.000	4	1.055.000	4	1.108.000	4	1.509.000	4	1.642.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							60.800.000		67.488.000		70.893.000		96.550.000		105.062.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	60.800.000	1	67.488.000	1	70.893.000	1	96.550.000	1	105.062.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							2.850.000		3.164.000		3.323.000		4.526.000		4.925.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	2.850.000	4	3.164.000	4	3.323.000	4	4.526.000	4	4.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							54.346.000		60.324.000		63.367.000		86.301.000		93.910.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pekalongan
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	54.346.000	4	60.324.000	4	63.367.000	4	86.301.000	4	93.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							1.250.000		1.388.000		1.458.000		1.985.000		2.160.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	1.250.000	4	1.388.000	4	1.458.000	4	1.985.000	4	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan								920.254.000		1.021.481.000		1.073.016.000		1.461.363.000		1.590.199.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****																	Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	920.254.000	4	1.021.481.000	4	1.073.016.000	4	1.461.363.000	4	1.590.199.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							640.000		710.000		746.000		1.016.000		1.106.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	640.000	4	710.000	4	746.000	4	1.016.000	4	1.106.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							205.200.000		227.772.000		239.263.000		325.858.000		354.586.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	205.200.000	4	227.772.000	4	239.263.000	4	325.858.000	4	354.586.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							1.230.000		1.365.000		1.434.000		1.953.000		2.125.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	1.230.000	4	1.365.000	4	1.434.000	4	1.953.000	4	2.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							713.184.000		791.634.000		831.573.000		1.132.536.000		1.232.382.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	713.184.000	4	791.634.000	4	831.573.000	4	1.132.536.000	4	1.232.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								280.036.000		310.840.000		326.522.000		444.696.000		483.903.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	280.036.000	1	310.840.000	1	326.522.000	1	444.696.000	1	483.903.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							18.541.000		20.581.000		21.619.000		29.443.000		32.039.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit	1	1	1	18.541.000	1	20.581.000	1	21.619.000	1	29.443.000	1	32.039.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan Dibayarkan Pajaknya *****														
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							131.640.000		146.120.000		153.492.000		209.044.000		227.474.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	131.640.000	1	146.120.000	1	153.492.000	1	209.044.000	1	227.474.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							27.029.000		30.002.000		31.516.000		42.922.000		46.706.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	27.029.000	1	30.002.000	1	31.516.000	1	42.922.000	1	46.706.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							8.000.000		8.880.000		9.328.000		12.704.000		13.824.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Pekalongan
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	8.000.000	1	8.880.000	1	9.328.000	1	12.704.000	1	13.824.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							69.861.000		77.546.000		81.458.000		110.939.000		120.720.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	69.861.000	1	77.546.000	1	81.458.000	1	110.939.000	1	120.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							16.965.000		18.831.000		19.781.000		26.940.000		29.316.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	16.965.000	1	18.831.000	1	19.781.000	1	26.940.000	1	29.316.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							8.000.000		8.880.000		9.328.000		12.704.000		13.824.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1	1	1	8.000.000	1	8.880.000	1	9.328.000	1	12.704.000	1	13.824.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****															
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.410.145.000		1.565.263.000		1.644.229.000		2.238.833.000		2.436.212.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen ***	%	95	95	95	1.410.145.000	95	1.565.263.000	95	1.644.229.000	95	2.238.833.000	95	2.436.212.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					fikasi Keuangan SKPD *****																Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								25.000.000		27.750.000		29.150.000		39.700.000		43.200.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	25.000.000	4	27.750.000	4	29.150.000	4	39.700.000	4	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							25.000.000		27.750.000		29.150.000		39.700.000		43.200.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	25.000.000	4	27.750.000	4	29.150.000	4	39.700.000	4	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								198.481.000		220.315.000		231.429.000		315.187.000		342.975.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	198.481.000	100	220.315.000	100	231.429.000	100	315.187.000	100	342.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							4.163.000		4.621.000		4.854.000		6.611.000		7.194.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.163.000	1	4.621.000	1	4.854.000	1	6.611.000	1	7.194.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							45.380.000		50.372.000		52.913.000		72.063.000		78.417.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	45.380.000	1	50.372.000	1	52.913.000	1	72.063.000	1	78.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							7.817.000		8.677.000		9.115.000		12.413.000		13.508.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.817.000	1	8.677.000	1	9.115.000	1	12.413.000	1	13.508.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.000.000		1.110.000		1.166.000		1.588.000		1.728.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.000.000	4	1.110.000	4	1.166.000	4	1.588.000	4	1.728.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							74.241.000		82.408.000		86.565.000		117.895.000		128.288.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Kajen
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	74.241.000	1	82.408.000	1	86.565.000	1	117.895.000	1	128.288.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							9.900.000		10.989.000		11.543.000		15.721.000		17.107.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	9.900.000	4	10.989.000	4	11.543.000	4	15.721.000	4	17.107.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							55.980.000		62.138.000		65.273.000		88.896.000		96.733.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	55.980.000	4	62.138.000	4	65.273.000	4	88.896.000	4	96.733.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				tah Daerah ****																	n Daerah Kajen
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								833.840.000		925.563.000		972.257.000		1.324.137.000		1.440.875.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	833.840.000	4	925.563.000	4	972.257.000	4	1.324.137.000	4	1.440.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							650.000		722.000		758.000		1.032.000		1.123.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	650.000	4	722.000	4	758.000	4	1.032.000	4	1.123.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya							186.400.000		206.904.000		217.342.000		296.003.000		322.099.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Air dan Listrik *****																Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	186.400.000	4	206.904.000	4	217.342.000	4	296.003.000	4	322.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							1.640.000		1.820.000		1.912.000		2.604.000		2.834.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	1.640.000	4	1.820.000	4	1.912.000	4	2.604.000	4	2.834.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							645.150.000		716.117.000		752.245.000		1.024.498.000		1.114.819.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	645.150.000	4	716.117.000	4	752.245.000	4	1.024.498.000	4	1.114.819.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								310.324.000		344.460.000		361.838.000		492.795.000		536.240.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan	Unit	1	1	1	310.324.000	1	344.460.000	1	361.838.000	1	492.795.000	1	536.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						urusan pemerintahan daerah	pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****														
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							22.854.000		25.368.000		26.648.000		36.292.000		39.492.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	22.854.000	1	25.368.000	1	26.648.000	1	36.292.000	1	39.492.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							123.950.000		137.585.000		144.526.000		196.833.000		214.186.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	123.950.000	1	137.585.000	1	144.526.000	1	196.833.000	1	214.186.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							46.400.000		51.504.000		54.102.000		73.683.000		80.179.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	46.400.000	1	51.504.000	1	54.102.000	1	73.683.000	1	80.179.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	5.550.000	1	5.830.000	1	7.940.000	1	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							67.120.000		74.503.000		78.262.000		106.587.000		115.983.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	67.120.000	1	74.503.000	1	78.262.000	1	106.587.000	1	115.983.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							39.000.000		43.290.000		45.474.000		61.932.000		67.392.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	1	39.000.000	1	43.290.000	1	45.474.000	1	61.932.000	1	67.392.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi *****														
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							6.000.000		6.660.000		6.996.000		9.528.000		10.368.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	6.000.000	1	6.660.000	1	6.996.000	1	9.528.000	1	10.368.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.433.513.000		1.591.200.000		1.671.476.000		2.264.430.000		2.464.065.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang ***	%	95	95	95	1.433.513.000	95	1.591.200.000	95	1.671.476.000	95	2.264.430.000	95	2.464.065.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		55.501.000		60.394.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	55.501.000	4	60.394.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi							42.500.000		47.175.000		49.555.000		55.501.000		60.394.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pelaksanaan Tugas ASN *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	55.501.000	4	60.394.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								13.500.000		14.985.000		15.741.000		21.438.000		23.328.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	13.500.000	4	14.985.000	4	15.741.000	4	21.438.000	4	23.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							13.500.000		14.985.000		15.741.000		21.438.000		23.328.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	13.500.000	4	14.985.000	4	15.741.000	4	21.438.000	4	23.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								160.089.000		177.699.000		186.663.000		254.221.000		276.634.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	160.089.000	100	177.699.000	100	186.663.000	100	254.221.000	100	276.634.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							15.439.000		17.137.000		18.002.000		24.517.000		26.679.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	15.439.000	1	17.137.000	1	18.002.000	1	24.517.000	1	26.679.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							23.119.000		25.662.000		26.957.000		36.713.000		39.950.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	23.119.000	1	25.662.000	1	26.957.000	1	36.713.000	1	39.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							10.852.000		12.046.000		12.653.000		17.233.000		18.752.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.852.000	1	12.046.000	1	12.653.000	1	17.233.000	1	18.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							580.000		644.000		676.000		921.000		1.002.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Batang
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	580.000	4	644.000	4	676.000	4	921.000	4	1.002.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							47.169.000		52.358.000		54.999.000		74.904.000		81.508.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	47.169.000	1	52.358.000	1	54.999.000	1	74.904.000	1	81.508.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							15.310.000		16.994.000		17.851.000		24.312.000		26.456.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	15.310.000	4	16.994.000	4	17.851.000	4	24.312.000	4	26.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							47.620.000		52.858.000		55.525.000		75.621.000		82.287.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	47.620.000	4	52.858.000	4	55.525.000	4	75.621.000	4	82.287.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								901.900.000		1.001.109.000		1.051.615.000		1.432.218.000		1.558.484.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	901.900.000	4	1.001.109.000	4	1.051.615.000	4	1.432.218.000	4	1.558.484.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.200.000		1.332.000		1.399.000		1.906.000		2.074.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.200.000	4	1.332.000	4	1.399.000	4	1.906.000	4	2.074.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							183.000.000		203.130.000		213.378.000		290.604.000		316.224.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	183.000.000	4	203.130.000	4	213.378.000	4	290.604.000	4	316.224.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							717.700.000		796.647.000		836.838.000		1.139.708.000		1.240.186.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	717.700.000	4	796.647.000	4	836.838.000	4	1.139.708.000	4	1.240.186.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								315.524.000		350.232.000		367.902.000		501.052.000		545.225.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	315.524.000	1	350.232.000	1	367.902.000	1	501.052.000	1	545.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							54.956.000		61.001.000		64.079.000		87.270.000		94.964.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	54.956.000	1	61.001.000	1	64.079.000	1	87.270.000	1	94.964.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							146.823.000		162.974.000		171.196.000		233.155.000		253.710.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1	1	1	146.823.000	1	162.974.000	1	171.196.000	1	233.155.000	1	253.710.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****															TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							30.745.000		34.127.000		35.849.000		48.823.000		53.127.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	30.745.000	1	34.127.000	1	35.849.000	1	48.823.000	1	53.127.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							1.000.000		1.110.000		1.166.000		1.588.000		1.728.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	1.000.000	1	1.110.000	1	1.166.000	1	1.588.000	1	1.728.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		55.500.000		58.300.000		79.400.000		86.400.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	55.500.000	1	58.300.000	1	79.400.000	1	86.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							26.000.000		28.860.000		30.316.000		41.288.000		44.928.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	26.000.000	1	28.860.000	1	30.316.000	1	41.288.000	1	44.928.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							6.000.000		6.660.000		6.996.000		9.528.000		10.368.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	6.000.000	1	6.660.000	1	6.996.000	1	9.528.000	1	10.368.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.525.397.000		1.693.192.000		1.778.615.000		2.422.329.000		2.635.888.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang ***	%	95	95	95	1.525.397.000	95	1.693.192.000	95	1.778.615.000	95	2.422.329.000	95	2.635.888.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Pemalang
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.490.000		73.440.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.490.000	4	73.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.490.000		73.440.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.490.000	4	73.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								9.924.000		11.016.000		11.571.000		15.759.000		17.149.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	9.924.000	4	11.016.000	4	11.571.000	4	15.759.000	4	17.149.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							9.924.000		11.016.000		11.571.000		15.759.000		17.149.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	9.924.000	4	11.016.000	4	11.571.000	4	15.759.000	4	17.149.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat								171.237.000		190.073.000		199.663.000		271.923.000		295.898.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Daerah ****																	Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	171.237.000	100	190.073.000	100	199.663.000	100	271.923.000	100	295.898.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							9.000.000		9.990.000		10.494.000		14.292.000		15.552.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	9.000.000	1	9.990.000	1	10.494.000	1	14.292.000	1	15.552.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							21.250.000		23.588.000		24.778.000		33.745.000		36.720.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	21.250.000	1	23.588.000	1	24.778.000	1	33.745.000	1	36.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang							3.255.000		3.613.000		3.795.000		5.169.000		5.625.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Cetakan dan Penggandaan *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.255.000	1	3.613.000	1	3.795.000	1	5.169.000	1	5.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.800.000		1.998.000		2.099.000		2.858.000		3.110.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	1.800.000	1	1.998.000	1	2.099.000	1	2.858.000	1	3.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							61.922.000		68.733.000		72.201.000		98.332.000		107.001.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	61.922.000	1	68.733.000	1	72.201.000	1	98.332.000	1	107.001.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							2.880.000		3.197.000		3.358.000		4.573.000		4.977.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	2.880.000	4	3.197.000	4	3.358.000	4	4.573.000	4	4.977.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							68.630.000		76.179.000		80.023.000		108.984.000		118.593.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	68.630.000	4	76.179.000	4	80.023.000	4	108.984.000	4	118.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							2.500.000		2.775.000		2.915.000		3.970.000		4.320.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	2.500.000	4	2.775.000	4	2.915.000	4	3.970.000	4	4.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								971.581.000		1.078.455.000		1.132.864.000		1.542.870.000		1.678.892.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	971.581.000	4	1.078.455.000	4	1.132.864.000	4	1.542.870.000	4	1.678.892.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							300.000		333.000		350.000		476.000		518.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	300.000	4	333.000	4	350.000	4	476.000	4	518.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							246.000.000		273.060.000		286.836.000		390.648.000		425.088.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	246.000.000	4	273.060.000	4	286.836.000	4	390.648.000	4	425.088.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							1.500.000		1.665.000		1.749.000		2.382.000		2.592.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	1.500.000	4	1.665.000	4	1.749.000	4	2.382.000	4	2.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							723.781.000		803.397.000		843.929.000		1.149.364.000		1.250.694.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	723.781.000	4	803.397.000	4	843.929.000	4	1.149.364.000	4	1.250.694.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								330.155.000		366.473.000		384.962.000		524.287.000		570.509.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	330.155.000	1	366.473.000	1	384.962.000	1	524.287.000	1	570.509.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							17.979.000		19.957.000		20.964.000		28.551.000		31.068.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	1	1	1	17.979.000	1	19.957.000	1	20.964.000	1	28.551.000	1	31.068.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****															TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							170.156.000		188.873.000		198.402.000		270.208.000		294.030.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	170.156.000	1	188.873.000	1	198.402.000	1	270.208.000	1	294.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							29.250.000		32.468.000		34.106.000		46.449.000		50.544.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	29.250.000	1	32.468.000	1	34.106.000	1	46.449.000	1	50.544.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	5.550.000	1	5.830.000	1	7.940.000	1	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							80.000.000		88.800.000		93.280.000		127.040.000		138.240.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	80.000.000	1	88.800.000	1	93.280.000	1	127.040.000	1	138.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							22.250.000		24.698.000		25.944.000		35.333.000		38.448.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	22.250.000	1	24.698.000	1	25.944.000	1	35.333.000	1	38.448.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.520.000		6.127.000		6.436.000		8.766.000		9.539.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	5.520.000	1	6.127.000	1	6.436.000	1	8.766.000	1	9.539.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.570.282.000		1.743.013.000		1.830.950.000		2.493.133.000		2.712.927.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal ***	%	95	95	95	1.570.282.000	95	1.743.013.000	95	1.830.950.000	95	2.493.133.000	95	2.712.927.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Tegal
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								20.000.000		22.200.000		23.320.000		31.760.000		34.560.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	20.000.000	4	22.200.000	4	23.320.000	4	31.760.000	4	34.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							20.000.000		22.200.000		23.320.000		31.760.000		34.560.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	20.000.000	4	22.200.000	4	23.320.000	4	31.760.000	4	34.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Kepegawaian *****																n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								163.969.000		182.005.000		191.188.000		260.384.000		283.337.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	163.969.000	100	182.005.000	100	191.188.000	100	260.384.000	100	283.337.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.124.000		5.688.000		5.975.000		8.137.000		8.854.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.124.000	1	5.688.000	1	5.975.000	1	8.137.000	1	8.854.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							60.753.000		67.436.000		70.838.000		96.476.000		104.981.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	60.753.000	1	67.436.000	1	70.838.000	1	96.476.000	1	104.981.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							6.013.000		6.674.000		7.011.000		9.549.000		10.390.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.013.000	1	6.674.000	1	7.011.000	1	9.549.000	1	10.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.040.000		1.154.000		1.213.000		1.652.000		1.797.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.040.000	4	1.154.000	4	1.213.000	4	1.652.000	4	1.797.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							44.774.000		49.699.000		52.206.000		71.101.000		77.369.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	Paket	1	1	1	44.774.000	1	49.699.000	1	52.206.000	1	71.101.000	1	77.369.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							yang Disediakan *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							7.074.000		7.852.000		8.248.000		11.234.000		12.224.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	7.074.000	4	7.852.000	4	8.248.000	4	11.234.000	4	12.224.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							39.191.000		43.502.000		45.697.000		62.235.000		67.722.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	39.191.000	4	43.502.000	4	45.697.000	4	62.235.000	4	67.722.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.141.340.000		1.266.887.000		1.330.803.000		1.812.448.000		1.972.235.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.141.340.000	4	1.266.887.000	4	1.330.803.000	4	1.812.448.000	4	1.972.235.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.202.000		3.554.000		3.734.000		5.085.000		5.533.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	3.202.000	4	3.554.000	4	3.734.000	4	5.085.000	4	5.533.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							342.000.000		379.620.000		398.772.000		543.096.000		590.976.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	342.000.000	4	379.620.000	4	398.772.000	4	543.096.000	4	590.976.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							796.138.000		883.713.000		928.297.000		1.264.267.000		1.375.726.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	796.138.000	4	883.713.000	4	928.297.000	4	1.264.267.000	4	1.375.726.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								202.473.000		224.746.000		236.084.000		321.527.000		349.873.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	Unit	1	1	1	202.473.000	1	224.746.000	1	236.084.000	1	321.527.000	1	349.873.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							dilakukan pemeliharaan ****														
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							9.416.000		10.452.000		10.979.000		14.953.000		16.271.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	9.416.000	1	10.452.000	1	10.979.000	1	14.953.000	1	16.271.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								74.335.000		82.512.000		86.675.000		118.044.000		128.451.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	74.335.000	1	82.512.000	1	86.675.000	1	118.044.000	1	128.451.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan							38.432.000		42.660.000		44.812.000		61.030.000		66.410.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Mesin Lainnya *****																n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	38.432.000	1	42.660.000	1	44.812.000	1	61.030.000	1	66.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	5.550.000	1	5.830.000	1	7.940.000	1	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							59.650.000		66.212.000		69.552.000		94.724.000		103.075.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	59.650.000	1	66.212.000	1	69.552.000	1	94.724.000	1	103.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.640.000		6.260.000		6.576.000		8.956.000		9.746.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	5.640.000	1	6.260.000	1	6.576.000	1	8.956.000	1	9.746.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.100.000	1	11.660.000	1	15.880.000	1	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.468.001.000		1.629.483.000		2.677.753.000		2.319.275.000		2.523.747.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi ***	%	95	95	95	1.468.001.000	95	1.629.483.000	95	2.677.753.000	95	2.319.275.000	95	2.523.747.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		51.071.000		55.580.000		60.480.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	51.071.000	4	55.580.000	4	60.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		51.071.000		55.580.000		60.480.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	51.071.000	4	55.580.000	4	60.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								20.000.000		22.200.000		6.413.000		31.760.000		34.560.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	20.000.000	4	22.200.000	4	6.413.000	4	31.760.000	4	34.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							20.000.000		22.200.000		6.413.000		31.760.000		34.560.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	20.000.000	4	22.200.000	4	6.413.000	4	31.760.000	4	34.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi								0		0		0		0		0	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Kepegawaian Perangkat Daerah ****																	Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								141.983.000		157.602.000		313.956.000		225.469.000		245.347.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	141.983.000	100	157.602.000	100	313.956.000	100	225.469.000	100	245.347.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							6.405.000		7.110.000		7.579.000		10.171.000		11.068.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	1	1	6.405.000	1	7.110.000	1	7.579.000	1	10.171.000	1	11.068.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							28.941.000		32.125.000		25.681.000		45.958.000		50.010.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	28.941.000	1	32.125.000	1	25.681.000	1	45.958.000	1	50.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							6.050.000		6.716.000		28.567.000		9.607.000		10.454.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.050.000	1	6.716.000	1	28.567.000	1	9.607.000	1	10.454.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							900.000		999.000		4.198.000		1.429.000		1.555.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	900.000	4	999.000	4	4.198.000	4	1.429.000	4	1.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							41.894.000		46.502.000		149.696.000		66.528.000		72.393.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	41.894.000	1	46.502.000	1	149.696.000	1	66.528.000	1	72.393.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							5.200.000		5.772.000		19.006.000		8.258.000		8.986.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	5.200.000	4	5.772.000	4	19.006.000	4	8.258.000	4	8.986.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							52.593.000		58.378.000		79.229.000		83.518.000		90.881.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	52.593.000	4	58.378.000	4	79.229.000	4	83.518.000	4	90.881.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Slawi
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								946.104.000		1.050.176.000		1.999.760.000		1.502.413.000		1.634.868.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	946.104.000	4	1.050.176.000	4	1.999.760.000	4	1.502.413.000	4	1.634.868.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							880.000		977.000		2.332.000		1.397.000		1.521.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	880.000	4	977.000	4	2.332.000	4	1.397.000	4	1.521.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							186.360.000		206.860.000		511.641.000		295.940.000		322.030.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	186.360.000	4	206.860.000	4	511.641.000	4	295.940.000	4	322.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							2.460.000		2.731.000		326.480.000		3.906.000		4.251.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	2.460.000	4	2.731.000	4	326.480.000	4	3.906.000	4	4.251.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							756.404.000		839.608.000		1.159.307.000		1.201.170.000		1.307.066.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	756.404.000	4	839.608.000	4	1.159.307.000	4	1.201.170.000	4	1.307.066.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								317.414.000		352.330.000		306.553.000		504.053.000		548.492.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	317.414.000	1	352.330.000	1	306.553.000	1	504.053.000	1	548.492.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							27.444.000		30.463.000		0		43.581.000		47.423.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	27.444.000	1	30.463.000	1	0	1	43.581.000	1	47.423.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							136.555.000		151.576.000		119.060.000		216.849.000		235.967.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	136.555.000	1	151.576.000	1	119.060.000	1	216.849.000	1	235.967.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Operasional atau Lapangan															
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							37.663.000		41.806.000		45.124.000		59.809.000		65.082.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	37.663.000	1	41.806.000	1	45.124.000	1	59.809.000	1	65.082.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		8.745.000		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	8.745.000	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							74.152.000		82.309.000		69.960.000		117.753.000		128.135.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	1	1	74.152.000	1	82.309.000	1	69.960.000	1	117.753.000	1	128.135.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi *****														
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							33.900.000		37.629.000		63.664.000		53.833.000		58.579.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	33.900.000	1	37.629.000	1	63.664.000	1	53.833.000	1	58.579.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							7.700.000		8.547.000		0		12.228.000		13.306.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	7.700.000	1	8.547.000	1	0	1	12.228.000	1	13.306.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									2.123.775.000		2.357.391.000		2.476.321.000		3.372.080.000		3.669.364.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes ***	%	95	95	95	2.123.775.000	95	2.357.391.000	95	2.476.321.000	95	3.372.080.000	95	3.669.364.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
		X.XX.01.1.02		Administrasi								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Keuangan Perangkat Daerah ****																	Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada	Dokumen	4	4	4	10.000.000	4	11.100.000	4	11.660.000	4	15.880.000	4	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						daerah pada perangkat daerah	perangkat daerah ****														
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	10.000.000	4	11.100.000	4	11.660.000	4	15.880.000	4	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								218.560.000		242.602.000		254.841.000		347.074.000		377.671.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	218.560.000	100	242.602.000	100	254.841.000	100	347.074.000	100	377.671.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							2.882.000		3.199.000		3.360.000		4.577.000		4.980.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.882.000	1	3.199.000	1	3.360.000	1	4.577.000	1	4.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							25.838.000		28.680.000		30.127.000		41.031.000		44.648.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	25.838.000	1	28.680.000	1	30.127.000	1	41.031.000	1	44.648.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							8.320.000		9.235.000		9.701.000		13.212.000		14.377.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	8.320.000	1	9.235.000	1	9.701.000	1	13.212.000	1	14.377.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.500.000		1.665.000		1.749.000		2.382.000		2.592.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.500.000	4	1.665.000	4	1.749.000	4	2.382.000	4	2.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							87.751.000		97.404.000		102.318.000		139.349.000		151.634.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	87.751.000	1	97.404.000	1	102.318.000	1	139.349.000	1	151.634.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							10.660.000		11.833.000		12.430.000		16.928.000		18.420.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	10.660.000	4	11.833.000	4	12.430.000	4	16.928.000	4	18.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							81.609.000		90.586.000		95.156.000		129.595.000		141.020.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	81.609.000	4	90.586.000	4	95.156.000	4	129.595.000	4	141.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan								1.553.281.000		1.724.142.000		1.811.125.000		2.466.611.000		2.684.069.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****																	Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.553.281.000	4	1.724.142.000	4	1.811.125.000	4	2.466.611.000	4	2.684.069.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.921.000		2.132.000		2.240.000		3.051.000		3.319.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.921.000	4	2.132.000	4	2.240.000	4	3.051.000	4	3.319.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							381.990.000		424.009.000		445.400.000		606.600.000		660.079.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	381.990.000	4	424.009.000	4	445.400.000	4	606.600.000	4	660.079.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							Kantor yang Disediakan *****														
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1.169.370.000		1.298.001.000		1.363.485.000		1.856.960.000		2.020.671.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	1.169.370.000	4	1.298.001.000	4	1.363.485.000	4	1.856.960.000	4	2.020.671.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								299.434.000		332.372.000		349.140.000		475.501.000		517.422.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	299.434.000	1	332.372.000	1	349.140.000	1	475.501.000	1	517.422.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							17.330.000		19.236.000		20.207.000		27.520.000		29.946.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	17.330.000	1	19.236.000	1	20.207.000	1	27.520.000	1	29.946.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa							120.400.000		133.644.000		140.386.000		191.195.000		208.051.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	120.400.000	1	133.644.000	1	140.386.000	1	191.195.000	1	208.051.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							44.005.000		48.846.000		51.310.000		69.880.000		76.041.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	44.005.000	1	48.846.000	1	51.310.000	1	69.880.000	1	76.041.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							71.589.000		79.464.000		83.473.000		113.683.000		123.706.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	71.589.000	1	79.464.000	1	83.473.000	1	113.683.000	1	123.706.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							34.110.000		37.862.000		39.772.000		54.167.000		58.942.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	34.110.000	1	37.862.000	1	39.772.000	1	54.167.000	1	58.942.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							12.000.000		13.320.000		13.992.000		19.056.000		20.736.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	12.000.000	1	13.320.000	1	13.992.000	1	19.056.000	1	20.736.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN									1.977.558.000		2.195.090.000		2.305.833.000		3.140.364.000		3.417.222.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			TAHAN DAERAH PROVINSI ***																		n Pendapatan Daerah Banyumas
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto ***	%	95	95	95	1.977.558.000	95	2.195.090.000	95	2.305.833.000	95	3.140.364.000	95	3.417.222.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								44.887.000		49.825.000		52.338.000		71.281.000		77.565.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	44.887.000	4	49.825.000	4	52.338.000	4	71.281.000	4	77.565.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							44.887.000		49.825.000		52.338.000		71.281.000		77.565.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	44.887.000	4	49.825.000	4	52.338.000	4	71.281.000	4	77.565.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							i Keuangan SKPD *****														
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								16.100.000		17.871.000		18.773.000		25.567.000		27.821.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	16.100.000	4	17.871.000	4	18.773.000	4	25.567.000	4	27.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							16.100.000		17.871.000		18.773.000		25.567.000		27.821.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	16.100.000	4	17.871.000	4	18.773.000	4	25.567.000	4	27.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Banyumas
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								237.236.000		263.332.000		276.617.000		376.731.000		409.945.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	237.236.000	100	263.332.000	100	276.617.000	100	376.731.000	100	409.945.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							7.500.000		8.325.000		8.745.000		11.910.000		12.960.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.500.000	1	8.325.000	1	8.745.000	1	11.910.000	1	12.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							17.100.000		18.981.000		19.939.000		27.155.000		29.549.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	17.100.000	1	18.981.000	1	19.939.000	1	27.155.000	1	29.549.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							12.310.000		13.664.000		14.353.000		19.548.000		21.272.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	12.310.000	1	13.664.000	1	14.353.000	1	19.548.000	1	21.272.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.500.000		1.665.000		1.749.000		2.382.000		2.592.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.500.000	4	1.665.000	4	1.749.000	4	2.382.000	4	2.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							114.976.000		127.623.000		134.062.000		182.582.000		198.679.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	114.976.000	1	127.623.000	1	134.062.000	1	182.582.000	1	198.679.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							7.850.000		8.714.000		9.153.000		12.466.000		13.565.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	7.850.000	4	8.714.000	4	9.153.000	4	12.466.000	4	13.565.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							76.000.000		84.360.000		88.616.000		120.688.000		131.328.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	76.000.000	4	84.360.000	4	88.616.000	4	120.688.000	4	131.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.298.275.000		1.441.086.000		1.513.789.000		2.061.661.000		2.243.419.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.298.275.000	4	1.441.086.000	4	1.513.789.000	4	2.061.661.000	4	2.243.419.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							4.280.000		4.751.000		4.990.000		6.797.000		7.396.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	4.280.000	4	4.751.000	4	4.990.000	4	6.797.000	4	7.396.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							230.925.000		256.327.000		269.259.000		366.709.000		399.038.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	4	4	4	230.925.000	4	256.327.000	4	269.259.000	4	366.709.000	4	399.038.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							27.000.000		29.970.000		31.482.000		42.876.000		46.656.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	27.000.000	4	29.970.000	4	31.482.000	4	42.876.000	4	46.656.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1.036.070.000		1.150.038.000		1.208.058.000		1.645.279.000		1.790.329.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	1.036.070.000	4	1.150.038.000	4	1.208.058.000	4	1.645.279.000	4	1.790.329.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								381.060.000		422.976.000		444.316.000		605.124.000		658.472.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	381.060.000	1	422.976.000	1	444.316.000	1	605.124.000	1	658.472.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan							17.540.000		19.469.000		20.452.000		27.854.000		30.309.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****																Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	17.540.000	1	19.469.000	1	20.452.000	1	27.854.000	1	30.309.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								140.036.000		155.440.000		163.282.000		222.377.000		241.982.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	140.036.000	1	155.440.000	1	163.282.000	1	222.377.000	1	241.982.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							31.454.000		34.914.000		36.675.000		49.949.000		54.353.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	31.454.000	1	34.914.000	1	36.675.000	1	49.949.000	1	54.353.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.100.000	1	11.660.000	1	15.880.000	1	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							127.030.000		141.003.000		148.117.000		201.724.000		219.508.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	127.030.000	1	141.003.000	1	148.117.000	1	201.724.000	1	219.508.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							50.000.000		55.500.000		58.300.000		79.400.000		86.400.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	55.500.000	1	58.300.000	1	79.400.000	1	86.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					atau Bangunan Lainnya *****																Pendapatan Daerah Banyumas
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	5.550.000	1	5.830.000	1	7.940.000	1	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									2.013.265.000		2.234.726.000		2.347.467.000		3.196.588.000		3.478.404.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap ***	%	95	95	95	2.013.265.000	95	2.234.726.000	95	2.347.467.000	95	3.196.588.000	95	3.478.404.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								14.600.000		16.206.000		17.024.000		23.185.000		25.229.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	14.600.000	4	16.206.000	4	17.024.000	4	23.185.000	4	25.229.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							14.600.000		16.206.000		17.024.000		23.185.000		25.229.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	14.600.000	4	16.206.000	4	17.024.000	4	23.185.000	4	25.229.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								222.697.000		247.194.000		259.665.000		353.642.000		384.820.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	222.697.000	100	247.194.000	100	259.665.000	100	353.642.000	100	384.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							6.405.000		7.110.000		7.468.000		10.171.000		11.068.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.405.000	1	7.110.000	1	7.468.000	1	10.171.000	1	11.068.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							3.000.000		3.330.000		3.498.000		4.764.000		5.184.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	3.330.000	1	3.498.000	1	4.764.000	1	5.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							30.794.000		34.181.000		35.906.000		48.901.000		53.212.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	30.794.000	1	34.181.000	1	35.906.000	1	48.901.000	1	53.212.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							4.436.000		4.924.000		5.172.000		7.044.000		7.665.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.436.000	1	4.924.000	1	5.172.000	1	7.044.000	1	7.665.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							800.000		888.000		933.000		1.270.000		1.382.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	800.000	4	888.000	4	933.000	4	1.270.000	4	1.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							90.857.000		100.851.000		105.939.000		144.281.000		157.001.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	90.857.000	1	100.851.000	1	105.939.000	1	144.281.000	1	157.001.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							10.226.000		11.351.000		11.924.000		16.239.000		17.671.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	10.226.000	4	11.351.000	4	11.924.000	4	16.239.000	4	17.671.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							71.179.000		79.009.000		82.995.000		113.032.000		122.997.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	71.179.000	4	79.009.000	4	82.995.000	4	113.032.000	4	122.997.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	5.000.000	4	5.550.000	4	5.830.000	4	7.940.000	4	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.302.760.000		1.446.064.000		1.519.017.000		2.068.782.000		2.251.169.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.302.760.000	4	1.446.064.000	4	1.519.017.000	4	2.068.782.000	4	2.251.169.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.500.000		1.665.000		1.749.000		2.382.000		2.592.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.500.000	4	1.665.000	4	1.749.000	4	2.382.000	4	2.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							296.400.000		329.004.000		345.602.000		470.683.000		512.179.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	296.400.000	4	329.004.000	4	345.602.000	4	470.683.000	4	512.179.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							2.460.000		2.731.000		2.868.000		3.906.000		4.251.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	2.460.000	4	2.731.000	4	2.868.000	4	3.906.000	4	4.251.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1.002.400.000		1.112.664.000		1.168.798.000		1.591.811.000		1.732.147.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	1.002.400.000	4	1.112.664.000	4	1.168.798.000	4	1.591.811.000	4	1.732.147.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang								430.708.000		478.087.000		502.206.000		683.965.000		744.264.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Urusan Pemerintahan Daerah ****																	Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	430.708.000	1	478.087.000	1	502.206.000	1	683.965.000	1	744.264.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							37.952.000		42.127.000		44.252.000		60.268.000		65.581.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	37.952.000	1	42.127.000	1	44.252.000	1	60.268.000	1	65.581.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							217.056.000		240.932.000		253.087.000		344.685.000		375.073.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	217.056.000	1	240.932.000	1	253.087.000	1	344.685.000	1	375.073.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Cilacap
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							41.450.000		46.010.000		48.331.000		65.823.000		71.626.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	41.450.000	1	46.010.000	1	48.331.000	1	65.823.000	1	71.626.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							15.000.000		16.650.000		17.490.000		23.820.000		25.920.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	15.000.000	1	16.650.000	1	17.490.000	1	23.820.000	1	25.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							87.500.000		97.125.000		102.025.000		138.950.000		151.200.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	87.500.000	1	97.125.000	1	102.025.000	1	138.950.000	1	151.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor							24.750.000		27.473.000		28.859.000		39.303.000		42.768.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					atau Bangunan Lainnya *****																n Pendapatan Daerah Cilacap
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	24.750.000	1	27.473.000	1	28.859.000	1	39.303.000	1	42.768.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							7.000.000		7.770.000		8.162.000		11.116.000		12.096.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	7.000.000	1	7.770.000	1	8.162.000	1	11.116.000	1	12.096.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.323.588.000		1.469.182.000		1.543.302.000		2.101.383.000		2.286.642.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga ***	%	95	95	95	1.323.588.000	95	1.469.182.000	95	1.543.302.000	95	2.101.383.000	95	2.286.642.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Purbalingga
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.014.000		72.922.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.014.000	4	72.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Mengukur hasil pelaksanaan layanan administrasi barang milik daerah pada	Dokumen	4	4	4	10.000.000	4	11.100.000	4	11.660.000	4	15.880.000	4	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							perangkat daerah ****														
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	10.000.000	4	11.100.000	4	11.660.000	4	15.880.000	4	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								228.273.000		253.383.000		266.165.000		362.498.000		394.456.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Purbalingga
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	228.273.000	100	253.383.000	100	266.165.000	100	362.498.000	100	394.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							2.000.000		2.220.000		2.332.000		3.176.000		3.456.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.000.000	1	2.220.000	1	2.332.000	1	3.176.000	1	3.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							31.252.000		34.690.000		36.440.000		49.628.000		54.003.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	31.252.000	1	34.690.000	1	36.440.000	1	49.628.000	1	54.003.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							8.418.000		9.344.000		9.815.000		13.368.000		14.546.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	8.418.000	1	9.344.000	1	9.815.000	1	13.368.000	1	14.546.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							840.000		932.000		979.000		1.334.000		1.452.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	840.000	4	932.000	4	979.000	4	1.334.000	4	1.452.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							79.551.000		88.302.000		92.756.000		126.327.000		137.464.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	79.551.000	1	88.302.000	1	92.756.000	1	126.327.000	1	137.464.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							9.990.000		11.089.000		11.648.000		15.864.000		17.263.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	9.990.000	4	11.089.000	4	11.648.000	4	15.864.000	4	17.263.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							96.222.000		106.806.000		112.195.000		152.801.000		166.272.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	96.222.000	4	106.806.000	4	112.195.000	4	152.801.000	4	166.272.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								802.322.000		890.577.000		935.508.000		1.274.088.000		1.386.412.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	802.322.000	4	890.577.000	4	935.508.000	4	1.274.088.000	4	1.386.412.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.134.000		3.479.000		3.654.000		4.977.000		5.416.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	3.134.000	4	3.479.000	4	3.654.000	4	4.977.000	4	5.416.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							204.300.000		226.773.000		238.214.000		324.428.000		353.030.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan	4	4	4	204.300.000	4	226.773.000	4	238.214.000	4	324.428.000	4	353.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							dan Listrik yang Disediakan *****														
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							4.921.000		5.462.000		5.738.000		7.815.000		8.503.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	4.921.000	4	5.462.000	4	5.738.000	4	7.815.000	4	8.503.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							589.967.000		654.863.000		687.902.000		936.868.000		1.019.463.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	589.967.000	4	654.863.000	4	687.902.000	4	936.868.000	4	1.019.463.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								240.493.000		266.947.000		280.414.000		381.903.000		415.572.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	240.493.000	1	266.947.000	1	280.414.000	1	381.903.000	1	415.572.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya							24.168.000		26.826.000		28.180.000		38.379.000		41.762.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****																Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	24.168.000	1	26.826.000	1	28.180.000	1	38.379.000	1	41.762.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								127.460.000		141.481.000		148.618.000		202.406.000		220.251.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	127.460.000	1	141.481.000	1	148.618.000	1	202.406.000	1	220.251.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							43.572.000		48.365.000		50.805.000		69.192.000		75.292.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	43.572.000	1	48.365.000	1	50.805.000	1	69.192.000	1	75.292.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							2.000.000		2.220.000		2.332.000		3.176.000		3.456.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	2.000.000	1	2.220.000	1	2.332.000	1	3.176.000	1	3.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							20.000.000		22.200.000		23.320.000		31.760.000		34.560.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	20.000.000	1	22.200.000	1	23.320.000	1	31.760.000	1	34.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							16.093.000		17.863.000		18.764.000		25.556.000		27.809.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	16.093.000	1	17.863.000	1	18.764.000	1	25.556.000	1	27.809.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							7.200.000		7.992.000		8.395.000		11.434.000		12.442.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	7.200.000	1	7.992.000	1	8.395.000	1	11.434.000	1	12.442.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.396.299.000		1.549.894.000		1.628.087.000		2.200.648.000		2.394.661.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara ***	%	95	95	95	1.396.299.000	95	1.549.894.000	95	1.628.087.000	95	2.200.648.000	95	2.394.661.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		50.816.000		55.296.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	50.816.000	4	55.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		50.816.000		55.296.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	50.816.000	4	55.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								9.800.000		10.878.000		11.427.000		15.562.000		16.934.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	9.800.000	4	10.878.000	4	11.427.000	4	15.562.000	4	16.934.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							9.800.000		10.878.000		11.427.000		15.562.000		16.934.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Banjarnegara
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	9.800.000	4	10.878.000	4	11.427.000	4	15.562.000	4	16.934.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								201.664.000		223.849.000		235.141.000		320.243.000		348.476.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	201.664.000	100	223.849.000	100	235.141.000	100	320.243.000	100	348.476.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.125.000		5.689.000		5.976.000		8.139.000		8.856.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.125.000	1	5.689.000	1	5.976.000	1	8.139.000	1	8.856.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							32.796.000		36.404.000		38.240.000		52.080.000		56.671.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	32.796.000	1	36.404.000	1	38.240.000	1	52.080.000	1	56.671.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							10.320.000		11.455.000		12.033.000		16.388.000		17.833.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.320.000	1	11.455.000	1	12.033.000	1	16.388.000	1	17.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							2.250.000		2.498.000		2.624.000		3.573.000		3.888.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	2.250.000	4	2.498.000	4	2.624.000	4	3.573.000	4	3.888.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							86.042.000		95.507.000		100.325.000		136.635.000		148.681.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	86.042.000	1	95.507.000	1	100.325.000	1	136.635.000	1	148.681.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							6.214.000		6.898.000		7.246.000		9.868.000		10.738.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	6.214.000	4	6.898.000	4	7.246.000	4	9.868.000	4	10.738.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							56.417.000		62.623.000		65.782.000		89.590.000		97.489.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	56.417.000	4	62.623.000	4	65.782.000	4	89.590.000	4	97.489.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							2.500.000		2.775.000		2.915.000		3.970.000		4.320.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	2.500.000	4	2.775.000	4	2.915.000	4	3.970.000	4	4.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								824.986.000		915.734.000		961.934.000		1.310.077.000		1.425.576.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	824.986.000	4	915.734.000	4	961.934.000	4	1.310.077.000	4	1.425.576.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.000.000		2.220.000		2.332.000		3.176.000		3.456.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	2.000.000	4	2.220.000	4	2.332.000	4	3.176.000	4	3.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							148.800.000		165.168.000		173.501.000		236.294.000		257.126.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	148.800.000	4	165.168.000	4	173.501.000	4	236.294.000	4	257.126.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							3.601.000		3.997.000		4.199.000		5.718.000		6.223.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Banjarnegara
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	3.601.000	4	3.997.000	4	4.199.000	4	5.718.000	4	6.223.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							670.585.000		744.349.000		781.902.000		1.064.889.000		1.158.771.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	670.585.000	4	744.349.000	4	781.902.000	4	1.064.889.000	4	1.158.771.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								317.349.000		352.258.000		370.030.000		503.950.000		548.379.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	317.349.000	1	352.258.000	1	370.030.000	1	503.950.000	1	548.379.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							16.800.000		18.648.000		19.589.000		26.678.000		29.030.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	1	1	1	16.800.000	1	18.648.000	1	19.589.000	1	26.678.000	1	29.030.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****															TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							140.787.000		156.274.000		164.158.000		223.570.000		243.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	140.787.000	1	156.274.000	1	164.158.000	1	223.570.000	1	243.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							31.541.000		35.011.000		36.777.000		50.087.000		54.503.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	31.541.000	1	35.011.000	1	36.777.000	1	50.087.000	1	54.503.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							3.000.000		3.330.000		3.498.000		4.764.000		5.184.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	3.000.000	1	3.330.000	1	3.498.000	1	4.764.000	1	5.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							87.621.000		97.259.000		102.166.000		139.142.000		151.409.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	87.621.000	1	97.259.000	1	102.166.000	1	139.142.000	1	151.409.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							33.600.000		37.296.000		39.178.000		53.357.000		58.061.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	33.600.000	1	37.296.000	1	39.178.000	1	53.357.000	1	58.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							4.000.000		4.440.000		4.664.000		6.352.000		6.912.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Pemeliharaan/Reha	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	1	1	1	4.000.000	1	4.440.000	1	4.664.000	1	6.352.000	1	6.912.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****														TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.052.441.000		1.168.211.000		1.227.147.000		1.670.958.000		1.818.272.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang ***	%	95	95	95	1.052.441.000	95	1.168.211.000	95	1.227.147.000	95	1.670.958.000	95	1.818.272.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.172.000		73.094.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.172.000	4	73.094.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.172.000		73.094.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.172.000	4	73.094.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan							0		0		0		0		0	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								6.000.000		6.660.000		6.996.000		9.528.000		10.368.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	6.000.000	4	6.660.000	4	6.996.000	4	9.528.000	4	10.368.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							6.000.000		6.660.000		6.996.000		9.528.000		10.368.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	6.000.000	4	6.660.000	4	6.996.000	4	9.528.000	4	10.368.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	Laporan	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							kewenangan perangkat daerah ****														
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								166.717.000		185.056.000		194.393.000		264.747.000		288.087.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	166.717.000	100	185.056.000	100	194.393.000	100	264.747.000	100	288.087.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.202.000		5.774.000		6.066.000		8.261.000		8.989.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.202.000	1	5.774.000	1	6.066.000	1	8.261.000	1	8.989.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							19.250.000		21.368.000		22.446.000		30.569.000		33.264.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Magelang
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	19.250.000	1	21.368.000	1	22.446.000	1	30.569.000	1	33.264.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							8.170.000		9.069.000		9.526.000		12.974.000		14.118.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	8.170.000	1	9.069.000	1	9.526.000	1	12.974.000	1	14.118.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							825.000		916.000		962.000		1.310.000		1.426.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	825.000	4	916.000	4	962.000	4	1.310.000	4	1.426.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							67.294.000		74.696.000		78.465.000		106.863.000		116.284.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	67.294.000	1	74.696.000	1	78.465.000	1	106.863.000	1	116.284.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							16.785.000		18.631.000		19.571.000		26.655.000		29.004.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	16.785.000	4	18.631.000	4	19.571.000	4	26.655.000	4	29.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							49.191.000		54.602.000		57.357.000		78.115.000		85.002.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	49.191.000	4	54.602.000	4	57.357.000	4	78.115.000	4	85.002.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								673.093.000		747.133.000		784.827.000		1.068.871.000		1.163.105.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	673.093.000	4	747.133.000	4	784.827.000	4	1.068.871.000	4	1.163.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.260.000		1.399.000		1.469.000		2.001.000		2.177.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.260.000	4	1.399.000	4	1.469.000	4	2.001.000	4	2.177.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							175.130.000		194.394.000		204.202.000		278.106.000		302.625.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	175.130.000	4	194.394.000	4	204.202.000	4	278.106.000	4	302.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							496.703.000		551.340.000		579.156.000		788.764.000		858.303.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	496.703.000	4	551.340.000	4	579.156.000	4	788.764.000	4	858.303.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								164.131.000		182.187.000		191.376.000		260.640.000		283.618.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	164.131.000	1	182.187.000	1	191.376.000	1	260.640.000	1	283.618.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							20.511.000		22.767.000		23.916.000		32.571.000		35.443.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	20.511.000	1	22.767.000	1	23.916.000	1	32.571.000	1	35.443.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya							81.370.000		90.321.000		94.877.000		129.216.000		140.607.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****																Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	81.370.000	1	90.321.000	1	94.877.000	1	129.216.000	1	140.607.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							20.350.000		22.589.000		23.728.000		32.316.000		35.165.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	20.350.000	1	22.589.000	1	23.728.000	1	32.316.000	1	35.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							2.500.000		2.775.000		2.915.000		3.970.000		4.320.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	2.500.000	1	2.775.000	1	2.915.000	1	3.970.000	1	4.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							20.000.000		22.200.000		23.320.000		31.760.000		34.560.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	20.000.000	1	22.200.000	1	23.320.000	1	31.760.000	1	34.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							13.350.000		14.819.000		15.566.000		21.200.000		23.069.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	13.350.000	1	14.819.000	1	15.566.000	1	21.200.000	1	23.069.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							6.050.000		6.716.000		7.054.000		9.607.000		10.454.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	6.050.000	1	6.716.000	1	7.054.000	1	9.607.000	1	10.454.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									1.616.101.000		1.793.873.000		1.884.376.000		2.561.128.000		2.786.920.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			PROVINSI ***																		n Daerah Mungkid
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid ***	%	95	95	95	1.616.101.000	95	1.793.873.000	95	1.884.376.000	95	2.561.128.000	95	2.786.920.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		62.250.000		67.738.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	62.250.000	4	67.738.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		62.250.000		67.738.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	62.250.000	4	67.738.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								8.250.000		9.158.000		9.620.000		13.101.000		14.256.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	8.250.000	4	9.158.000	4	9.620.000	4	13.101.000	4	14.256.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							8.250.000		9.158.000		9.620.000		13.101.000		14.256.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	8.250.000	4	9.158.000	4	9.620.000	4	13.101.000	4	14.256.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								169.759.000		188.433.000		197.940.000		269.577.000		293.344.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	169.759.000	100	188.433.000	100	197.940.000	100	269.577.000	100	293.344.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.764.000		6.398.000		6.721.000		9.153.000		9.960.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.764.000	1	6.398.000	1	6.721.000	1	9.153.000	1	9.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							34.590.000		38.395.000		40.332.000		54.929.000		59.772.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	34.590.000	1	38.395.000	1	40.332.000	1	54.929.000	1	59.772.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							12.600.000		13.986.000		14.692.000		20.009.000		21.773.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	12.600.000	1	13.986.000	1	14.692.000	1	20.009.000	1	21.773.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							750.000		833.000		875.000		1.191.000		1.296.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	750.000	4	833.000	4	875.000	4	1.191.000	4	1.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							59.821.000		66.401.000		69.751.000		94.996.000		103.371.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	59.821.000	1	66.401.000	1	69.751.000	1	94.996.000	1	103.371.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							14.463.000		16.054.000		16.864.000		22.967.000		24.992.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	14.463.000	4	16.054.000	4	16.864.000	4	22.967.000	4	24.992.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							41.771.000		46.366.000		48.705.000		66.332.000		72.180.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	41.771.000	4	46.366.000	4	48.705.000	4	66.332.000	4	72.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan								1.076.327.000		1.194.723.000		1.254.997.000		1.709.207.000		1.859.893.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****																	Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.076.327.000	4	1.194.723.000	4	1.254.997.000	4	1.709.207.000	4	1.859.893.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.562.000		2.844.000		2.987.000		4.068.000		4.427.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	2.562.000	4	2.844.000	4	2.987.000	4	4.068.000	4	4.427.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							212.600.000		235.986.000		247.892.000		337.609.000		367.373.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	212.600.000	4	235.986.000	4	247.892.000	4	337.609.000	4	367.373.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							820.000		910.000		956.000		1.302.000		1.417.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Laporan	4	4	4	820.000	4	910.000	4	956.000	4	1.302.000	4	1.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							Kantor yang Disediakan *****														
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							860.345.000		954.983.000		1.003.162.000		1.366.228.000		1.486.676.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	860.345.000	4	954.983.000	4	1.003.162.000	4	1.366.228.000	4	1.486.676.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								319.265.000		354.384.000		372.264.000		506.993.000		551.689.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	319.265.000	1	354.384.000	1	372.264.000	1	506.993.000	1	551.689.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							18.080.000		20.069.000		21.081.000		28.711.000		31.242.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	18.080.000	1	20.069.000	1	21.081.000	1	28.711.000	1	31.242.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa							135.793.000		150.730.000		158.335.000		215.639.000		234.650.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	135.793.000	1	150.730.000	1	158.335.000	1	215.639.000	1	234.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							35.229.000		39.104.000		41.077.000		55.944.000		60.876.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	35.229.000	1	39.104.000	1	41.077.000	1	55.944.000	1	60.876.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							2.100.000		2.331.000		2.449.000		3.335.000		3.629.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	2.100.000	1	2.331.000	1	2.449.000	1	3.335.000	1	3.629.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							73.160.000		81.208.000		85.305.000		116.178.000		126.420.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	73.160.000	1	81.208.000	1	85.305.000	1	116.178.000	1	126.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							45.903.000		50.952.000		53.523.000		72.894.000		79.320.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	45.903.000	1	50.952.000	1	53.523.000	1	72.894.000	1	79.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.000.000		9.990.000		10.494.000		14.292.000		15.552.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	9.000.000	1	9.990.000	1	10.494.000	1	14.292.000	1	15.552.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN									1.368.864.000		1.519.439.000		1.596.095.000		2.173.249.000		2.364.845.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			TAHAN DAERAH PROVINSI ***																		n Pendapatan Daerah Kebumen
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen ***	%	95	95	95	1.368.864.000	95	1.519.439.000	95	1.596.095.000	95	2.173.249.000	95	2.364.845.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		66.982.000		72.887.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	66.982.000	4	72.887.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		66.982.000		72.887.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	66.982.000	4	72.887.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							i Keuangan SKPD *****														
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								8.000.000		8.880.000		9.328.000		12.704.000		13.824.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	8.000.000	4	8.880.000	4	9.328.000	4	12.704.000	4	13.824.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							8.000.000		8.880.000		9.328.000		12.704.000		13.824.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	8.000.000	4	8.880.000	4	9.328.000	4	12.704.000	4	13.824.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Kebumen
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								141.396.000		156.949.000		164.867.000		224.537.000		244.332.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	141.396.000	100	156.949.000	100	164.867.000	100	224.537.000	100	244.332.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							9.157.000		10.164.000		10.677.000		14.541.000		15.823.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	9.157.000	1	10.164.000	1	10.677.000	1	14.541.000	1	15.823.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							17.764.000		19.718.000		20.713.000		28.209.000		30.696.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	17.764.000	1	19.718.000	1	20.713.000	1	28.209.000	1	30.696.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							9.864.000		10.949.000		11.501.000		15.664.000		17.045.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	9.864.000	1	10.949.000	1	11.501.000	1	15.664.000	1	17.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.120.000		1.243.000		1.306.000		1.779.000		1.935.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.120.000	4	1.243.000	4	1.306.000	4	1.779.000	4	1.935.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							61.737.000		68.528.000		71.985.000		98.038.000		106.682.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	61.737.000	1	68.528.000	1	71.985.000	1	98.038.000	1	106.682.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							8.923.000		9.905.000		10.404.000		14.170.000		15.419.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	8.923.000	4	9.905.000	4	10.404.000	4	14.170.000	4	15.419.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							32.831.000		36.442.000		38.281.000		52.136.000		56.732.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	32.831.000	4	36.442.000	4	38.281.000	4	52.136.000	4	56.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								848.501.000		941.836.000		989.352.000		1.347.420.000		1.466.211.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Unit	4	4	4	848.501.000	4	941.836.000	4	989.352.000	4	1.347.420.000	4	1.466.211.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.281.000		2.532.000		2.660.000		3.622.000		3.942.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	2.281.000	4	2.532.000	4	2.660.000	4	3.622.000	4	3.942.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							190.200.000		211.122.000		221.773.000		302.038.000		328.666.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	4	4	4	190.200.000	4	211.122.000	4	221.773.000	4	302.038.000	4	328.666.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							656.020.000		728.182.000		764.919.000		1.041.760.000		1.133.603.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	4	656.020.000	4	728.182.000	4	764.919.000	4	1.041.760.000	4	1.133.603.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								328.467.000		364.599.000		382.993.000		521.606.000		567.591.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	328.467.000	1	364.599.000	1	382.993.000	1	521.606.000	1	567.591.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan							129.700.000		143.967.000		151.230.000		205.964.000		224.122.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****																Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	129.700.000	1	143.967.000	1	151.230.000	1	205.964.000	1	224.122.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							50.366.000		55.906.000		58.727.000		79.981.000		87.032.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	50.366.000	1	55.906.000	1	58.727.000	1	79.981.000	1	87.032.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	5.550.000	1	5.830.000	1	7.940.000	1	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							125.151.000		138.918.000		145.926.000		198.740.000		216.261.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	125.151.000	1	138.918.000	1	145.926.000	1	198.740.000	1	216.261.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.100.000	1	11.660.000	1	15.880.000	1	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							8.250.000		9.158.000		9.620.000		13.101.000		14.256.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					atau Bangunan Lainnya *****																Pendapatan Daerah Kebumen
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	8.250.000	1	9.158.000	1	9.620.000	1	13.101.000	1	14.256.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.609.200.000		1.786.213.000		1.876.326.000		2.555.409.000		2.780.697.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo ***	%	95	95	95	1.609.200.000	95	1.786.213.000	95	1.876.326.000	95	2.555.409.000	95	2.780.697.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.485.000		47.158.000		49.538.000		67.466.000		73.414.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.485.000	4	47.158.000	4	49.538.000	4	67.466.000	4	73.414.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.485.000		47.158.000		49.538.000		67.466.000		73.414.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokumen	4	4	4	42.485.000	4	47.158.000	4	49.538.000	4	67.466.000	4	73.414.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	10.000.000	4	11.100.000	4	11.660.000	4	15.880.000	4	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	10.000.000	4	11.100.000	4	11.660.000	4	15.880.000	4	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								162.469.000		180.341.000		189.439.000		258.001.000		280.747.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	162.469.000	100	180.341.000	100	189.439.000	100	258.001.000	100	280.747.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.000.000	1	11.100.000	1	11.660.000	1	15.880.000	1	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							36.780.000		40.826.000		42.885.000		58.407.000		63.556.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	36.780.000	1	40.826.000	1	42.885.000	1	58.407.000	1	63.556.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							4.287.000		4.759.000		4.999.000		6.808.000		7.408.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.287.000	1	4.759.000	1	4.999.000	1	6.808.000	1	7.408.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.609.000		1.786.000		1.876.000		2.555.000		2.780.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.609.000	4	1.786.000	4	1.876.000	4	2.555.000	4	2.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							51.253.000		56.891.000		59.761.000		81.390.000		88.565.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	51.253.000	1	56.891.000	1	59.761.000	1	81.390.000	1	88.565.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							15.145.000		16.811.000		17.659.000		24.050.000		26.171.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	15.145.000	4	16.811.000	4	17.659.000	4	24.050.000	4	26.171.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							43.395.000		48.168.000		50.599.000		68.911.000		74.987.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	43.395.000	4	48.168.000	4	50.599.000	4	68.911.000	4	74.987.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.168.940.000		1.297.524.000		1.362.984.000		1.856.276.000		2.019.928.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	1.168.940.000	4	1.297.524.000	4	1.362.984.000	4	1.856.276.000	4	2.019.928.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.405.000		2.670.000		2.804.000		3.819.000		4.156.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	2.405.000	4	2.670.000	4	2.804.000	4	3.819.000	4	4.156.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							178.800.000		198.468.000		208.481.000		283.934.000		308.966.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	178.800.000	4	198.468.000	4	208.481.000	4	283.934.000	4	308.966.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							987.735.000		1.096.386.000		1.151.699.000		1.568.523.000		1.706.806.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	987.735.000	4	1.096.386.000	4	1.151.699.000	4	1.568.523.000	4	1.706.806.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang								225.306.000		250.090.000		262.705.000		357.786.000		389.328.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Urusan Pemerintahan Daerah ****																	Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	umlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	225.306.000	1	250.090.000	1	262.705.000	1	357.786.000	1	389.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							12.667.000		14.060.000		14.770.000		20.115.000		21.889.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	12.667.000	1	14.060.000	1	14.770.000	1	20.115.000	1	21.889.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							97.638.000		108.378.000		113.846.000		155.049.000		168.718.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	97.638.000	1	108.378.000	1	113.846.000	1	155.049.000	1	168.718.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							16.503.000		18.318.000		19.242.000		26.207.000		28.517.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	16.503.000	1	18.318.000	1	19.242.000	1	26.207.000	1	28.517.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							1.750.000		1.943.000		2.040.000		2.779.000		3.024.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	1.750.000	1	1.943.000	1	2.040.000	1	2.779.000	1	3.024.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							67.418.000		74.834.000		78.609.000		107.060.000		116.498.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	67.418.000	1	74.834.000	1	78.609.000	1	107.060.000	1	116.498.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							23.280.000		25.841.000		27.144.000		36.969.000		40.228.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	23.280.000	1	25.841.000	1	27.144.000	1	36.969.000	1	40.228.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							6.050.000		6.716.000		7.054.000		9.607.000		10.454.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	6.050.000	1	6.716.000	1	7.054.000	1	9.607.000	1	10.454.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.368.192.000		1.518.693.000		1.595.311.000		2.160.304.000		2.350.758.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung ***	%	95	95	95	1.368.192.000	95	1.518.693.000	95	1.595.311.000	95	2.160.304.000	95	2.350.758.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		55.104.000		59.962.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Temanggung
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	55.104.000	4	59.962.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		55.104.000		59.962.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	55.104.000	4	59.962.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								152.561.000		169.342.000		177.885.000		242.267.000		263.625.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Temanggung
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	152.561.000	100	169.342.000	100	177.885.000	100	242.267.000	100	263.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							4.483.000		4.976.000		5.227.000		7.119.000		7.747.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.483.000	1	4.976.000	1	5.227.000	1	7.119.000	1	7.747.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							43.525.000		48.313.000		50.750.000		69.118.000		75.211.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	43.525.000	1	48.313.000	1	50.750.000	1	69.118.000	1	75.211.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							9.640.000		10.700.000		11.240.000		15.308.000		16.658.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	9.640.000	1	10.700.000	1	11.240.000	1	15.308.000	1	16.658.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan							1.320.000		1.465.000		1.539.000		2.096.000		2.281.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					dan Peraturan Perundang-Undangan *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.320.000	4	1.465.000	4	1.539.000	4	2.096.000	4	2.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							37.984.000		42.162.000		44.289.000		60.319.000		65.636.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	37.984.000	1	42.162.000	1	44.289.000	1	60.319.000	1	65.636.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							11.786.000		13.082.000		13.742.000		18.716.000		20.366.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	11.786.000	4	13.082.000	4	13.742.000	4	18.716.000	4	20.366.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							43.823.000		48.644.000		51.098.000		69.591.000		75.726.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	4	4	4	43.823.000	4	48.644.000	4	51.098.000	4	69.591.000	4	75.726.000	SUB BAGIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD *****														TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan								954.271.000		1.059.241.000		1.112.680.000		1.515.383.000		1.648.981.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Daerah ****																	n Daerah Temanggung
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	954.271.000	4	1.059.241.000	4	1.112.680.000	4	1.515.383.000	4	1.648.981.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.184.000		2.424.000		2.547.000		3.468.000		3.774.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	2.184.000	4	2.424.000	4	2.547.000	4	3.468.000	4	3.774.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							181.200.000		201.132.000		211.279.000		287.746.000		313.114.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	181.200.000	4	201.132.000	4	211.279.000	4	287.746.000	4	313.114.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							770.887.000		855.685.000		898.854.000		1.224.169.000		1.332.093.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	770.887.000	4	855.685.000	4	898.854.000	4	1.224.169.000	4	1.332.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								218.860.000		242.935.000		255.191.000		347.550.000		378.190.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	218.860.000	1	242.935.000	1	255.191.000	1	347.550.000	1	378.190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							13.888.000		15.416.000		16.193.000		22.054.000		23.998.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	13.888.000	1	15.416.000	1	16.193.000	1	22.054.000	1	23.998.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							92.596.000		102.782.000		107.967.000		147.042.000		160.006.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	92.596.000	1	102.782.000	1	107.967.000	1	147.042.000	1	160.006.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Operasional atau Lapangan															
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							21.137.000		23.462.000		24.646.000		33.566.000		36.525.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	21.137.000	1	23.462.000	1	24.646.000	1	33.566.000	1	36.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							69.148.000		76.754.000		80.627.000		109.807.000		119.488.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	69.148.000	1	76.754.000	1	80.627.000	1	109.807.000	1	119.488.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.091.000		15.641.000		16.430.000		22.377.000		24.349.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	14.091.000	1	15.641.000	1	16.430.000	1	22.377.000	1	24.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							8.000.000		8.880.000		9.328.000		12.704.000		13.824.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	8.000.000	1	8.880.000	1	9.328.000	1	12.704.000	1	13.824.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.251.000.000		1.388.609.000		1.458.665.000		1.986.144.000		2.161.245.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo ***	%	95	95	95	1.251.000.000	95	1.388.609.000	95	1.458.665.000	95	1.986.144.000	95	2.161.245.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						perangkat daerah UPPD Wonosobo															n Pendapatan Daerah Wonosobo
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.045.000		72.956.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.045.000	4	72.956.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.045.000		72.956.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.045.000	4	72.956.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat								6.000.000		6.660.000		6.996.000		9.528.000		10.368.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Daerah ****																	n Daerah Wonosobo
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	6.000.000	4	6.660.000	4	6.996.000	4	9.528.000	4	10.368.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							6.000.000		6.660.000		6.996.000		9.528.000		10.368.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	6.000.000	4	6.660.000	4	6.996.000	4	9.528.000	4	10.368.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum								202.170.000		224.408.000		235.729.000		321.046.000		349.350.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Perangkat Daerah ****																	n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	202.170.000	100	224.408.000	100	235.729.000	100	321.046.000	100	349.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							4.483.000		4.976.000		5.227.000		7.119.000		7.747.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.483.000	1	4.976.000	1	5.227.000	1	7.119.000	1	7.747.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							32.363.000		35.923.000		37.735.000		51.392.000		55.923.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	32.363.000	1	35.923.000	1	37.735.000	1	51.392.000	1	55.923.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							17.935.000		19.908.000		20.912.000		28.481.000		30.992.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	17.935.000	1	19.908.000	1	20.912.000	1	28.481.000	1	30.992.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.013.000		1.124.000		1.181.000		1.609.000		1.750.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.013.000	4	1.124.000	4	1.181.000	4	1.609.000	4	1.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							68.521.000		76.058.000		79.895.000		108.811.000		118.404.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	68.521.000	1	76.058.000	1	79.895.000	1	108.811.000	1	118.404.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							15.255.000		16.933.000		17.787.000		24.225.000		26.361.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	15.255.000	4	16.933.000	4	17.787.000	4	24.225.000	4	26.361.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							62.600.000		69.486.000		72.992.000		99.409.000		108.173.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	4	4	4	62.600.000	4	69.486.000	4	72.992.000	4	99.409.000	4	108.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD *****														
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								716.510.000		795.326.000		835.450.000		1.137.818.000		1.238.130.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	716.510.000	4	795.326.000	4	835.450.000	4	1.137.818.000	4	1.238.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.200.000		3.552.000		3.731.000		5.082.000		5.530.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	3.200.000	4	3.552.000	4	3.731.000	4	5.082.000	4	5.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							135.000.000		149.850.000		157.410.000		214.380.000		233.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	135.000.000	4	149.850.000	4	157.410.000	4	214.380.000	4	233.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							578.310.000		641.924.000		674.309.000		918.356.000		999.320.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	578.310.000	4	641.924.000	4	674.309.000	4	918.356.000	4	999.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang								283.820.000		315.040.000		330.935.000		450.707.000		490.441.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Urusan Pemerintahan Daerah ****																	Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	283.820.000	1	315.040.000	1	330.935.000	1	450.707.000	1	490.441.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							22.330.000		24.786.000		26.037.000		35.460.000		38.586.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	22.330.000	1	24.786.000	1	26.037.000	1	35.460.000	1	38.586.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							116.270.000		129.060.000		135.571.000		184.637.000		200.915.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	116.270.000	1	129.060.000	1	135.571.000	1	184.637.000	1	200.915.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							40.620.000		45.088.000		47.363.000		64.505.000		70.191.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	40.620.000	1	45.088.000	1	47.363.000	1	64.505.000	1	70.191.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							6.000.000		6.660.000		6.996.000		9.528.000		10.368.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	6.000.000	1	6.660.000	1	6.996.000	1	9.528.000	1	10.368.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							70.000.000		77.700.000		81.620.000		111.160.000		120.960.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	70.000.000	1	77.700.000	1	81.620.000	1	111.160.000	1	120.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor							24.600.000		27.306.000		28.684.000		39.065.000		42.509.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					atau Bangunan Lainnya *****																n Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	24.600.000	1	27.306.000	1	28.684.000	1	39.065.000	1	42.509.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							4.000.000		4.440.000		4.664.000		6.352.000		6.912.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	4.000.000	1	4.440.000	1	4.664.000	1	6.352.000	1	6.912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									485.000.000		538.350.000		565.509.000		770.180.000		838.080.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi ***	%	95	95	95	485.000.000	95	538.350.000	95	565.509.000	95	770.180.000	95	838.080.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.490.000		73.440.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pajak dan Retribusi Kelas A
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.490.000	4	73.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.500.000		47.175.000		49.555.000		67.490.000		73.440.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	4	42.500.000	4	47.175.000	4	49.555.000	4	67.490.000	4	73.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	N/A	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								101.500.000		112.665.000		118.348.000		161.182.000		175.392.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Retribusi Kelas A
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	100	101.500.000	100	112.665.000	100	118.348.000	100	161.182.000	100	175.392.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.550.000	1	5.830.000	1	7.940.000	1	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							10.000.000		11.100.000		11.660.000		15.880.000		17.280.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.000.000	1	11.100.000	1	11.660.000	1	15.880.000	1	17.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang							15.000.000		16.650.000		17.490.000		23.820.000		25.920.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Cetakan dan Penggandaan *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	15.000.000	1	16.650.000	1	17.490.000	1	23.820.000	1	25.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							1.500.000		1.665.000		1.749.000		2.382.000		2.592.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4	1.500.000	4	1.665.000	4	1.749.000	4	2.382.000	4	2.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							35.000.000		38.850.000		40.810.000		55.580.000		60.480.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	35.000.000	1	38.850.000	1	40.810.000	1	55.580.000	1	60.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							20.000.000		22.200.000		23.320.000		31.760.000		34.560.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	4	20.000.000	4	22.200.000	4	23.320.000	4	31.760.000	4	34.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		16.650.000		17.489.000		23.820.000		25.920.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	4	15.000.000	4	16.650.000	4	17.489.000	4	23.820.000	4	25.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								201.000.000		223.110.000		234.366.000		319.188.000		347.328.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	4	4	201.000.000	4	223.110.000	4	234.366.000	4	319.188.000	4	347.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.110.000		1.166.000		1.588.000		1.728.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	1.000.000	4	1.110.000	4	1.166.000	4	1.588.000	4	1.728.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							75.000.000		83.250.000		87.450.000		119.100.000		129.600.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan	4	4	4	75.000.000	4	83.250.000	4	87.450.000	4	119.100.000	4	129.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							dan Listrik yang Disediakan *****														
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							50.000.000		55.500.000		58.300.000		79.400.000		86.400.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	50.000.000	4	55.500.000	4	58.300.000	4	79.400.000	4	86.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							75.000.000		83.250.000		87.450.000		119.100.000		129.600.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	75.000.000	4	83.250.000	4	87.450.000	4	119.100.000	4	129.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								140.000.000		155.400.000		163.240.000		222.320.000		241.920.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	1	1	140.000.000	1	155.400.000	1	163.240.000	1	222.320.000	1	241.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya							25.000.000		27.750.000		29.150.000		39.700.000		43.200.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****																	Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	27.750.000	1	29.150.000	1	39.700.000	1	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								50.000.000		55.500.000		58.300.000		79.400.000		86.400.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	55.500.000	1	58.300.000	1	79.400.000	1	86.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							15.000.000		16.650.000		17.490.000		23.820.000		25.920.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	15.000.000	1	16.650.000	1	17.490.000	1	23.820.000	1	25.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							5.000.000		5.550.000		5.830.000		7.940.000		8.640.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	5.550.000	1	5.830.000	1	7.940.000	1	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							30.000.000		33.300.000		34.980.000		47.640.000		51.840.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	30.000.000	1	33.300.000	1	34.980.000	1	47.640.000	1	51.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							15.000.000		16.650.000		17.490.000		23.820.000		25.920.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	15.000.000	1	16.650.000	1	17.490.000	1	23.820.000	1	25.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah **											374.757.000		598.766.000		436.967.000		595.114.000		647.580.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah **	Angka	3,72	3,72	3,73	374.757.000	3,74	598.766.000	3,75	436.967.000	3,76	595.114.000	3,77	647.580.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									374.757.000		598.766.000		436.967.000		595.114.000		647.580.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ***	%	90	90	90	374.757.000	90	598.766.000	90	436.967.000	90	595.114.000	90	647.580.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								374.757.000		598.766.000		436.967.000		595.114.000		647.580.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	100	374.757.000	100	598.766.000	100	436.967.000	100	595.114.000	100	647.580.000	SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							202.138.000		350.000.000		235.693.000		320.995.000		349.294.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	4	4	4	202.138.000	4	350.000.000	4	235.693.000	4	320.995.000	4	349.294.000	SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							172.619.000		248.766.000		201.274.000		274.119.000		298.286.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	4	4	4	172.619.000	4	248.766.000	4	201.274.000	4	274.119.000	4	298.286.000	SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN PROGRAM
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli												40.479.815.000		44.932.607.000		47.211.621.000		64.281.945.000		69.949.127.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
Daerah *																					
							Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah *	%	11,64	1,68	5,41		12,07		19,35		26,79		34,36		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah **											32.644.720.000		36.235.645.000		37.977.475.000		51.839.817.000		56.410.082.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
							Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah **	%	13,53	6,81	8,91	32.644.720.000	15,75	36.235.645.000	23,02	37.977.475.000	30,75	51.839.817.000	38,94	56.410.082.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									2.146.365.000		2.382.465.000		2.502.661.000		3.408.428.000		3.708.919.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
						Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah ***	%	N/A	100	100	2.146.365.000	100	2.382.465.000	100	2.502.661.000	100	3.408.428.000	100	3.708.919.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								2.146.365.000		2.382.465.000		2.502.661.000		3.408.428.000		3.708.919.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
						Terlaksananya Analisis Data dan Perencanaan Pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Analisis Data dan Perencanaan Pendapatan Daerah ****	%	N/A	100	100	1.510.279.000	100	1.676.410.000	100	1.760.985.000	100	2.398.323.000	100	2.609.762.000	Subbidang Analisis data dan Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan
		5.02.04.1.01.0001			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah *****							1.510.279.000		1.676.410.000		1.760.985.000		2.398.323.000		2.609.762.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
						Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah *****	Dokumen	N/A	4	4	1.510.279.000	4	1.676.410.000	4	1.760.985.000	4	2.398.323.000	4	2.609.762.000	Subbidang Analisis data dan Perencanaan Pendapatan
						Terlaksananya Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengembangan Pendapatan Daerah ****	%	N/A	100	100	636.086.000	100	706.055.000	100	741.676.000	100	1.010.105.000	100	1.099.157.000	Subbidang Pengembangan Pendapatan
		5.02.04.1.01.0002			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah *****							636.086.000		706.055.000		741.676.000		1.010.105.000		1.099.157.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
						Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah *****	Laporan	N/A	4	4	636.086.000	4	706.055.000	4	741.676.000	4	1.010.105.000	4	1.099.157.000	Subbidang Pengembangan Pendapatan
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									2.659.260.000		2.951.778.000		3.100.697.000		4.222.905.000		4.595.202.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
						Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah ***	%	N/A	100	100	2.659.260.000	100	2.951.778.000	100	3.100.697.000	100	4.222.905.000	100	4.595.202.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Pajak Daerah
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								2.659.260.000		2.951.778.000		3.100.697.000		4.222.905.000		4.595.202.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
						Tersusunnya Kebijakan Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak Daerah ****	%	N/A	100	100	1.148.939.000	100	1.275.322.000	100	1.339.663.000	100	1.824.515.000	100	1.985.367.000	Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak
		5.02.04.1.01.0005			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah *****							1.148.939.000		1.275.322.000		1.339.663.000		1.824.515.000		1.985.367.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
						Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah *****	Laporan	N/A	4	4	1.148.939.000	4	1.275.322.000	4	1.339.663.000	4	1.824.515.000	4	1.985.367.000	Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak
						Tersusunnya Kebijakan Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah ****	%	N/A	100	100	1.510.321.000	100	1.676.456.000	100	1.761.034.000	100	2.398.390.000	100	2.609.835.000	Subbidang Keberatan dan Penagihan Pajak
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah *****							1.437.566.000		1.595.698.000		1.676.202.000		2.282.855.000		2.484.114.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
						Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. *****	Dokumen SSPD	N/A	4	4	1.437.566.000	4	1.595.698.000	4	1.676.202.000	4	2.282.855.000	4	2.484.114.000	Subbidang Keberatan dan Penagihan Pajak
		5.02.04.1.01.0011			Penyelesaian Keberatan							72.755.000		80.758.000		84.832.000		115.535.000		125.721.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pajak Daerah *****																Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
						Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti *****	Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	N/A	4	4	72.755.000	4	80.758.000	4	84.832.000	4	115.535.000	4	125.721.000	Subbidang Keberatan dan Penagihan Pajak
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									418.918.000		464.999.000		488.458.000		665.241.000		723.890.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengendalian dan Evaluasi
						Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset ***	%	N/A	100	100	418.918.000	100	464.999.000	100	488.458.000	100	665.241.000	100	723.890.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengendalian dan Evaluasi
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								418.918.000		464.999.000		488.458.000		665.241.000		723.890.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengendalian dan Evaluasi
						Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah ****	%	N/A	100	100	237.055.000	100	263.131.000	100	276.406.000	100	376.443.000	100	409.631.000	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah
		5.02.04.1.01.0012			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah *****							237.055.000		263.131.000		276.406.000		376.443.000		409.631.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengendalian dan Evaluasi
						Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah *****	Laporan	N/A	4	4	237.055.000	4	263.131.000	4	276.406.000	4	376.443.000	4	409.631.000	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pajak Daerah
						Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	Persentase Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset ****	%	N/A	100	100	181.863.000	100	201.868.000	100	212.052.000	100	288.798.000	100	314.259.000	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah *****							181.863.000		201.868.000		212.052.000		288.798.000		314.259.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengendalian dan Evaluasi
						Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah *****	Laporan	N/A	4	4	181.863.000	4	201.868.000	4	212.052.000	4	288.798.000	4	314.259.000	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									535.400.000		594.294.000		624.276.000		850.216.000		925.172.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I ***	%	N/A	100	100	535.400.000	100	594.294.000	100	624.276.000	100	850.216.000	100	925.172.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								535.400.000		594.294.000		624.276.000		850.216.000		925.172.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I ****	%	N/A	100	100	535.400.000	100	594.294.000	100	624.276.000	100	850.216.000	100	925.172.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							535.400.000		594.294.000		624.276.000		850.216.000		925.172.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	535.400.000	4	594.294.000	4	624.276.000	4	850.216.000	4	925.172.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									305.549.000		339.159.000		356.270.000		485.211.000		527.989.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II ***	%	N/A	100	100	305.549.000	100	339.159.000	100	356.270.000	100	485.211.000	100	527.989.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan								305.549.000		339.159.000		356.270.000		485.211.000		527.989.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Pendapatan Daerah ****																	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II ****	%	N/A	100	100	305.549.000	100	339.159.000	100	356.270.000	100	485.211.000	100	527.989.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							305.549.000		339.159.000		356.270.000		485.211.000		527.989.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	305.549.000	4	339.159.000	4	356.270.000	4	485.211.000	4	527.989.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									220.281.000		244.512.000		256.847.000		349.807.000		380.645.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III ***	%	N/A	100	100	220.281.000	100	244.512.000	100	256.847.000	100	349.807.000	100	380.645.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								220.281.000		244.512.000		256.847.000		349.807.000		380.645.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Semarang III
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III ****	%	N/A	100	100	220.281.000	100	244.512.000	100	256.847.000	100	349.807.000	100	380.645.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							220.281.000		244.512.000		256.847.000		349.807.000		380.645.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	220.281.000	4	244.512.000	4	256.847.000	4	349.807.000	4	380.645.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									370.643.000		411.414.000		432.169.000		588.581.000		640.471.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran ***	%	N/A	100	100	370.643.000	100	411.414.000	100	432.169.000	100	588.581.000	100	640.471.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								370.643.000		411.414.000		432.169.000		588.581.000		640.471.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran ****	%	N/A	100	100	370.643.000	100	411.414.000	100	432.169.000	100	588.581.000	100	640.471.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							370.643.000		411.414.000		432.169.000		588.581.000		640.471.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	370.643.000	4	411.414.000	4	432.169.000	4	588.581.000	4	640.471.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									169.643.000		188.304.000		197.804.000		269.394.000		293.143.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga ***	%	N/A	100	100	169.643.000	100	188.304.000	100	197.804.000	100	269.394.000	100	293.143.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								169.643.000		188.304.000		197.804.000		269.394.000		293.143.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga ****	%	N/A	100	100	169.643.000	100	188.304.000	100	197.804.000	100	269.394.000	100	293.143.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							169.643.000		188.304.000		197.804.000		269.394.000		293.143.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Salatiga
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	169.643.000	4	188.304.000	4	197.804.000	4	269.394.000	4	293.143.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									416.753.000		462.596.000		485.934.000		661.803.000		720.149.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal ***	%	N/A	100	100	416.753.000	100	462.596.000	100	485.934.000	100	661.803.000	100	720.149.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								416.753.000		462.596.000		485.934.000		661.803.000		720.149.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal ****	%	N/A	100	100	416.753.000	100	462.596.000	100	485.934.000	100	661.803.000	100	720.149.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							416.753.000		462.596.000		485.934.000		661.803.000		720.149.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum	Laporan	N/A	4	4	416.753.000	4	462.596.000	4	485.934.000	4	661.803.000	4	720.149.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							Ditindaklanjuti. *****														
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									370.551.000		411.312.000		432.062.000		588.435.000		640.312.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak ***	%	N/A	100	100	370.551.000	100	411.312.000	100	432.062.000	100	588.435.000	100	640.312.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								370.551.000		411.312.000		432.062.000		588.435.000		640.312.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak ****	%	N/A	100	100	370.551.000	100	411.312.000	100	432.062.000	100	588.435.000	100	640.312.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							370.551.000		411.312.000		432.062.000		588.435.000		640.312.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	370.551.000	4	411.312.000	4	432.062.000	4	588.435.000	4	640.312.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN									532.360.000		590.920.000		620.732.000		845.387.000		919.918.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			DAERAH ***																		n Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi ***	%	N/A	100	100	532.360.000	100	590.920.000	100	620.732.000	100	845.387.000	100	919.918.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								532.360.000		590.920.000		620.732.000		845.387.000		919.918.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi ****	%	N/A	100	100	532.360.000	100	590.920.000	100	620.732.000	100	845.387.000	100	919.918.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							532.360.000		590.920.000		620.732.000		845.387.000		919.918.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	532.360.000	4	590.920.000	4	620.732.000	4	845.387.000	4	919.918.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									498.595.000		553.441.000		581.362.000		791.769.000		861.572.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta ***	%	N/A	100	100	498.595.000	100	553.441.000	100	581.362.000	100	791.769.000	100	861.572.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								498.595.000		553.441.000		581.362.000		791.769.000		861.572.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta ****	%	N/A	100	100	498.595.000	100	553.441.000	100	581.362.000	100	791.769.000	100	861.572.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							498.595.000		553.441.000		581.362.000		791.769.000		861.572.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	498.595.000	4	553.441.000	4	581.362.000	4	791.769.000	4	861.572.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									459.525.000		510.073.000		535.806.000		729.726.000		794.060.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten ***	%	N/A	100	100	459.525.000	100	510.073.000	100	535.806.000	100	729.726.000	100	794.060.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
		5.02.04.1.01		Kegiatan								459.525.000		510.073.000		535.806.000		729.726.000		794.060.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Pengelolaan Pendapatan Daerah ****																	Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten ****	%	N/A	100	100	459.525.000	100	510.073.000	100	535.806.000	100	729.726.000	100	794.060.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							459.525.000		510.073.000		535.806.000		729.726.000		794.060.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	459.525.000	4	510.073.000	4	535.806.000	4	729.726.000	4	794.060.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									421.213.000		467.547.000		491.134.000		668.886.000		727.856.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen ***	%	N/A	100	100	421.213.000	100	467.547.000	100	491.134.000	100	668.886.000	100	727.856.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								421.213.000		467.547.000		491.134.000		668.886.000		727.856.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen ****	%	N/A	100	100	421.213.000	100	467.547.000	100	491.134.000	100	668.886.000	100	727.856.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							421.213.000		467.547.000		491.134.000		668.886.000		727.856.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	421.213.000	4	467.547.000	4	491.134.000	4	668.886.000	4	727.856.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									375.499.000		416.804.000		437.832.000		596.292.000		648.862.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo ***	%	N/A	100	100	375.499.000	100	416.804.000	100	437.832.000	100	596.292.000	100	648.862.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								375.499.000		416.804.000		437.832.000		596.292.000		648.862.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo ****	%	N/A	100	100	375.499.000	100	416.804.000	100	437.832.000	100	596.292.000	100	648.862.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi							375.499.000		416.804.000		437.832.000		596.292.000		648.862.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pajak Daerah *****																n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	375.499.000	4	416.804.000	4	437.832.000	4	596.292.000	4	648.862.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									439.587.000		487.942.000		512.559.000		698.065.000		759.607.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri ***	%	N/A	100	100	439.587.000	100	487.942.000	100	512.559.000	100	698.065.000	100	759.607.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								439.587.000		487.942.000		512.559.000		698.065.000		759.607.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri ****	%	N/A	100	100	439.587.000	100	487.942.000	100	512.559.000	100	698.065.000	100	759.607.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							439.587.000		487.942.000		512.559.000		698.065.000		759.607.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	439.587.000	4	487.942.000	4	512.559.000	4	698.065.000	4	759.607.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									384.701.000		427.018.000		448.561.000		610.905.000		664.763.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar ***	%	N/A	100	100	384.701.000	100	427.018.000	100	448.561.000	100	610.905.000	100	664.763.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								384.701.000		427.018.000		448.561.000		610.905.000		664.763.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar ****	%	N/A	100	100	384.701.000	100	427.018.000	100	448.561.000	100	610.905.000	100	664.763.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							384.701.000		427.018.000		448.561.000		610.905.000		664.763.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan	Laporan	N/A	4	4	384.701.000	4	427.018.000	4	448.561.000	4	610.905.000	4	664.763.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							Belum Ditindaklanjuti. *****														
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									380.454.000		422.304.000		443.609.000		604.161.000		657.425.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali ***	%	N/A	100	100	380.454.000	100	422.304.000	100	443.609.000	100	604.161.000	100	657.425.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								380.454.000		422.304.000		443.609.000		604.161.000		657.425.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali ****	%	N/A	100	100	380.454.000	100	422.304.000	100	443.609.000	100	604.161.000	100	657.425.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							380.454.000		422.304.000		443.609.000		604.161.000		657.425.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	380.454.000	4	422.304.000	4	443.609.000	4	604.161.000	4	657.425.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN									458.960.000		509.446.000		535.147.000		728.828.000		793.083.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			PENDAPATAN DAERAH ***																		Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati ***	%	N/A	100	100	458.960.000	100	509.446.000	100	535.147.000	100	728.828.000	100	793.083.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								458.960.000		509.446.000		535.147.000		728.828.000		793.083.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati ****	%	N/A	100	100	458.960.000	100	509.446.000	100	535.147.000	100	728.828.000	100	793.083.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							458.960.000		509.446.000		535.147.000		728.828.000		793.083.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	458.960.000	4	509.446.000	4	535.147.000	4	728.828.000	4	793.083.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									419.720.000		465.890.000		489.394.000		666.516.000		725.277.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora ***	%	N/A	100	100	419.720.000	100	465.890.000	100	489.394.000	100	666.516.000	100	725.277.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								419.720.000		465.890.000		489.394.000		666.516.000		725.277.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora ****	%	N/A	100	100	419.720.000	100	465.890.000	100	489.394.000	100	666.516.000	100	725.277.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							419.720.000		465.890.000		489.394.000		666.516.000		725.277.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	419.720.000	4	465.890.000	4	489.394.000	4	666.516.000	4	725.277.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									282.681.000		313.775.000		329.607.000		448.898.000		488.473.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang ***	%	N/A	100	100	282.681.000	100	313.775.000	100	329.607.000	100	448.898.000	100	488.473.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Rembang
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								282.681.000		313.775.000		329.607.000		448.898.000		488.473.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang ****	%	N/A	100	100	282.681.000	100	313.775.000	100	329.607.000	100	448.898.000	100	488.473.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							282.681.000		313.775.000		329.607.000		448.898.000		488.473.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	282.681.000	4	313.775.000	4	329.607.000	4	448.898.000	4	488.473.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									377.862.000		419.427.000		440.587.000		600.045.000		652.946.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus ***	%	N/A	100	100	377.862.000	100	419.427.000	100	440.587.000	100	600.045.000	100	652.946.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan								377.862.000		419.427.000		440.587.000		600.045.000		652.946.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Daerah ****																	n Pendapatan Daerah Kudus
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus ****	%	N/A	100	100	377.862.000	100	419.427.000	100	440.587.000	100	600.045.000	100	652.946.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							377.862.000		419.427.000		440.587.000		600.045.000		652.946.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	377.862.000	4	419.427.000	4	440.587.000	4	600.045.000	4	652.946.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									426.710.000		473.648.000		497.544.000		677.616.000		737.355.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara ***	%	N/A	100	100	426.710.000	100	473.648.000	100	497.544.000	100	677.616.000	100	737.355.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								426.710.000		473.648.000		497.544.000		677.616.000		737.355.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara ****	%	N/A	100	100	426.710.000	100	473.648.000	100	497.544.000	100	677.616.000	100	737.355.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							426.710.000		473.648.000		497.544.000		677.616.000		737.355.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	426.710.000	4	473.648.000	4	497.544.000	4	677.616.000	4	737.355.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									220.880.000		245.177.000		257.546.000		350.757.000		381.681.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan ***	%	N/A	100	100	220.880.000	100	245.177.000	100	257.546.000	100	350.757.000	100	381.681.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								220.880.000		245.177.000		257.546.000		350.757.000		381.681.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan ****	%	N/A	100	100	220.880.000	100	245.177.000	100	257.546.000	100	350.757.000	100	381.681.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							220.880.000		245.177.000		257.546.000		350.757.000		381.681.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	220.880.000	4	245.177.000	4	257.546.000	4	350.757.000	4	381.681.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									335.605.000		372.522.000		391.315.000		532.941.000		579.925.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen ***	%	N/A	100	100	335.605.000	100	372.522.000	100	391.315.000	100	532.941.000	100	579.925.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								335.605.000		372.522.000		391.315.000		532.941.000		579.925.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen ****	%	N/A	100	100	335.605.000	100	372.522.000	100	391.315.000	100	532.941.000	100	579.925.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							335.605.000		372.522.000		391.315.000		532.941.000		579.925.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Pelayanan dan	Jumlah Laporan Permasalahan yang	Laporan	N/A	4	4	335.605.000	4	372.522.000	4	391.315.000	4	532.941.000	4	579.925.000	SEKSI PELAYAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Konsultasi Pajak Daerah	Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****														AN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									362.962.000		402.888.000		423.214.000		576.383.000		627.198.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang ***	%	N/A	100	100	362.962.000	100	402.888.000	100	423.214.000	100	576.383.000	100	627.198.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								362.962.000		402.888.000		423.214.000		576.383.000		627.198.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang ****	%	N/A	100	100	362.962.000	100	402.888.000	100	423.214.000	100	576.383.000	100	627.198.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							362.962.000		402.888.000		423.214.000		576.383.000		627.198.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	362.962.000	4	402.888.000	4	423.214.000	4	576.383.000	4	627.198.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGEL									548.290.000		608.603.000		639.307.000		870.685.000		947.445.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			OLAAN PENDAPATAN DAERAH ***																		n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang ***	%	N/A	100	100	548.290.000	100	608.603.000	100	639.307.000	100	870.685.000	100	947.445.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								548.290.000		608.603.000		639.307.000		870.685.000		947.445.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang ****	%	N/A	100	100	548.290.000	100	608.603.000	100	639.307.000	100	870.685.000	100	947.445.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							548.290.000		608.603.000		639.307.000		870.685.000		947.445.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	548.290.000	4	608.603.000	4	639.307.000	4	870.685.000	4	947.445.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									321.368.000		356.719.000		374.715.000		510.332.000		555.324.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal ***	%	N/A	100	100	321.368.000	100	356.719.000	100	374.715.000	100	510.332.000	100	555.324.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								321.368.000		356.719.000		374.715.000		510.332.000		555.324.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal ****	%	N/A	100	100	321.368.000	100	356.719.000	100	374.715.000	100	510.332.000	100	555.324.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							321.368.000		356.719.000		374.715.000		510.332.000		555.324.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	321.368.000	4	356.719.000	4	374.715.000	4	510.332.000	4	555.324.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									571.206.000		634.040.000		579.759.000		907.075.000		987.044.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi ***	%	N/A	100	100	571.206.000	100	634.040.000	100	579.759.000	100	907.075.000	100	987.044.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Slawi
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								571.206.000		634.040.000		579.759.000		907.075.000		987.044.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi ****	%	N/A	100	100	571.206.000	100	634.040.000	100	579.759.000	100	907.075.000	100	987.044.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							571.206.000		634.040.000		579.759.000		907.075.000		987.044.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	571.206.000	4	634.040.000	4	579.759.000	4	907.075.000	4	987.044.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									597.074.000		662.752.000		696.188.000		948.154.000		1.031.743.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes ***	%	N/A	100	100	597.074.000	100	662.752.000	100	696.188.000	100	948.154.000	100	1.031.743.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan								597.074.000		662.752.000		696.188.000		948.154.000		1.031.743.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Daerah ****																	n Pendapatan Daerah Brebes
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes ****	%	N/A	100	100	597.074.000	100	662.752.000	100	696.188.000	100	948.154.000	100	1.031.743.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							597.074.000		662.752.000		696.188.000		948.154.000		1.031.743.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	597.074.000	4	662.752.000	4	696.188.000	4	948.154.000	4	1.031.743.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									407.889.000		452.756.000		475.599.000		647.728.000		704.832.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto ***	%	N/A	100	100	407.889.000	100	452.756.000	100	475.599.000	100	647.728.000	100	704.832.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								407.889.000		452.756.000		475.599.000		647.728.000		704.832.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto ****	%	N/A	100	100	407.889.000	100	452.756.000	100	475.599.000	100	647.728.000	100	704.832.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							407.889.000		452.756.000		475.599.000		647.728.000		704.832.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	407.889.000	4	452.756.000	4	475.599.000	4	647.728.000	4	704.832.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									387.574.000		430.207.000		451.911.000		615.468.000		669.728.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap ***	%	N/A	100	100	387.574.000	100	430.207.000	100	451.911.000	100	615.468.000	100	669.728.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								387.574.000		430.207.000		451.911.000		615.468.000		669.728.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap ****	%	N/A	100	100	387.574.000	100	430.207.000	100	451.911.000	100	615.468.000	100	669.728.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							387.574.000		430.207.000		451.911.000		615.468.000		669.728.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Cilacap
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	387.574.000	4	430.207.000	4	451.911.000	4	615.468.000	4	669.728.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									472.954.000		524.980.000		551.464.000		751.050.000		817.265.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga ***	%	N/A	100	100	472.954.000	100	524.980.000	100	551.464.000	100	751.050.000	100	817.265.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								472.954.000		524.980.000		551.464.000		751.050.000		817.265.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga ****	%	N/A	100	100	472.954.000	100	524.980.000	100	551.464.000	100	751.050.000	100	817.265.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							472.954.000		524.980.000		551.464.000		751.050.000		817.265.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Pelayanan dan	Jumlah Laporan Permasalahan yang	Laporan	N/A	4	4	472.954.000	4	524.980.000	4	551.464.000	4	751.050.000	4	817.265.000	SEKSI PELAYAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Konsultasi Pajak Daerah	Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****														AN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									284.725.000		316.044.000		331.989.000		452.144.000		492.005.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara ***	%	N/A	100	100	284.725.000	100	316.044.000	100	331.989.000	100	452.144.000	100	492.005.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								284.725.000		316.044.000		331.989.000		452.144.000		492.005.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara ****	%	N/A	100	100	284.725.000	100	316.044.000	100	331.989.000	100	452.144.000	100	492.005.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							284.725.000		316.044.000		331.989.000		452.144.000		492.005.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum	Laporan	N/A	4	4	284.725.000	4	316.044.000	4	331.989.000	4	452.144.000	4	492.005.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							Ditindaklanjuti. *****														
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									387.928.000		430.600.000		452.324.000		616.030.000		670.340.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang ***	%	N/A	100	100	387.928.000	100	430.600.000	100	452.324.000	100	616.030.000	100	670.340.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								387.928.000		430.600.000		452.324.000		616.030.000		670.340.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang ****	%	N/A	100	100	387.928.000	100	430.600.000	100	452.324.000	100	616.030.000	100	670.340.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							387.928.000		430.600.000		452.324.000		616.030.000		670.340.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	387.928.000	4	430.600.000	4	452.324.000	4	616.030.000	4	670.340.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN									458.186.000		508.587.000		534.245.000		727.599.000		791.746.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			DAERAH ***																		n Pendapatan Daerah Mungkid
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid ***	%	N/A	100	100	458.186.000	100	508.587.000	100	534.245.000	100	727.599.000	100	791.746.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								458.186.000		508.587.000		534.245.000		727.599.000		791.746.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid ****	%	N/A	100	100	458.186.000	100	508.587.000	100	534.245.000	100	727.599.000	100	791.746.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							458.186.000		508.587.000		534.245.000		727.599.000		791.746.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	458.186.000	4	508.587.000	4	534.245.000	4	727.599.000	4	791.746.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									369.847.000		410.530.000		431.242.000		587.317.000		639.096.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tercapainya Pendapatan Pajak	Persentase Capaian Pendapatan Pajak	%	N/A	100	100	369.847.000	100	410.530.000	100	431.242.000	100	587.317.000	100	639.096.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Daerah UPPD Kebumen	Daerah UPPD Kebumen ***														n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								369.847.000		410.530.000		431.242.000		587.317.000		639.096.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen ****	%	N/A	100	100	369.847.000	100	410.530.000	100	431.242.000	100	587.317.000	100	639.096.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							369.847.000		410.530.000		431.242.000		587.317.000		639.096.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	369.847.000	4	410.530.000	4	431.242.000	4	587.317.000	4	639.096.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									305.817.000		339.457.000		356.583.000		485.637.000		528.452.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo ***	%	N/A	100	100	305.817.000	100	339.457.000	100	356.583.000	100	485.637.000	100	528.452.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								305.817.000		339.457.000		356.583.000		485.637.000		528.452.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo ****	%	N/A	100	100	305.817.000	100	339.457.000	100	356.583.000	100	485.637.000	100	528.452.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							305.817.000		339.457.000		356.583.000		485.637.000		528.452.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	305.817.000	4	339.457.000	4	356.583.000	4	485.637.000	4	528.452.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									334.753.000		371.576.000		390.322.000		531.588.000		578.454.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung ***	%	N/A	100	100	334.753.000	100	371.576.000	100	390.322.000	100	531.588.000	100	578.454.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan								334.753.000		371.576.000		390.322.000		531.588.000		578.454.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Daerah ****																	n Pendapatan Daerah Temanggung
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung ****	%	N/A	100	100	334.753.000	100	371.576.000	100	390.322.000	100	531.588.000	100	578.454.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							334.753.000		371.576.000		390.322.000		531.588.000		578.454.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	334.753.000	4	371.576.000	4	390.322.000	4	531.588.000	4	578.454.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									250.384.000		277.926.000		291.947.000		397.610.000		432.664.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo ***	%	N/A	100	100	250.384.000	100	277.926.000	100	291.947.000	100	397.610.000	100	432.664.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								250.384.000		277.926.000		291.947.000		397.610.000		432.664.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tercapainya Pendapatan Pajak	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak	%	N/A	100	100	250.384.000	100	277.926.000	100	291.947.000	100	397.610.000	100	432.664.000	SEKSI PELAYAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Daerah UPPD Wonosobo	Daerah UPPD Wonosobo ****														AN PAJAK DAERAH
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah *****							250.384.000		277.926.000		291.947.000		397.610.000		432.664.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. *****	Laporan	N/A	4	4	250.384.000	4	277.926.000	4	291.947.000	4	397.610.000	4	432.664.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									12.956.048.000		14.381.213.000		15.106.753.000		20.574.204.000		22.388.051.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi ***	%	100	100	100	12.956.048.000	100	14.381.213.000	100	15.106.753.000	100	20.574.204.000	100	22.388.051.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								12.956.048.000		14.381.213.000		15.106.753.000		20.574.204.000		22.388.051.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah ****	%	N/A	100	100	10.956.048.000	100	12.161.213.000	100	12.774.753.000	100	17.398.204.000	100	18.932.051.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		5.02.04.1.01.0006			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah *****							956.048.000		1.061.213.000		1.114.753.000		1.518.204.000		1.652.051.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah *****	Laporan	4	4	4	956.048.000	4	1.061.213.000	4	1.114.753.000	4	1.518.204.000	4	1.652.051.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		5.02.04.1.01.0014			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah *****							10.000.000.000		11.100.000.000		11.660.000.000		15.880.000.000		17.280.000.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah *****	Laporan	4	4	4	10.000.000.000	4	11.100.000.000	4	11.660.000.000	4	15.880.000.000	4	17.280.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
						Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah ****	%	N/A	100	100	2.000.000.000	100	2.220.000.000	100	2.332.000.000	100	3.176.000.000	100	3.456.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		5.02.04.1.01.0004			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah *****							2.000.000.000		2.220.000.000		2.332.000.000		3.176.000.000		3.456.000.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah *****	Sarana dan Prasarana	1	1	1	2.000.000.000	1	2.220.000.000	1	2.332.000.000	1	3.176.000.000	1	3.456.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
	Tumbuhnya											7.835.095.000		8.696.962.000		9.234.146.000		12.442.128.000		13.539.045.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
	Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain **																				Pendapatan Daerah
							Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain **	%	23,82	-15,95	-6,63	7.835.095.000	-0,61	8.696.962.000	6,7	9.234.146.000	13,15	12.442.128.000	18,57	13.539.045.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ***									352.707.000		391.505.000		411.256.000		560.099.000		609.478.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
						Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah ***	%	N/A	100	100	352.707.000	100	391.505.000	100	411.256.000	100	560.099.000	100	609.478.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah ****								352.707.000		391.505.000		411.256.000		560.099.000		609.478.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
						Tersusunnya Kebijakan Penilaian	Persentase Tersusunnya Kebijakan Penilaian	%	N/A	100	100	352.707.000	100	391.505.000	100	411.256.000	100	560.099.000	100	609.478.000	Subbidang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah ****														Pemanfaatan Aset
		5.02.03.1.01.0008			Penilaian Barang Milik Daerah *****							352.707.000		391.505.000		411.256.000		560.099.000		609.478.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
						Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah *****	Laporan	N/A	4	4	352.707.000	4	391.505.000	4	411.256.000	4	560.099.000	4	609.478.000	Subbidang Pemanfaatan Aset
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									355.291.000		394.373.000		414.269.000		564.202.000		613.943.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
						Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain ***	%	N/A	100	100	355.291.000	100	394.373.000	100	414.269.000	100	564.202.000	100	613.943.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								355.291.000		394.373.000		414.269.000		564.202.000		613.943.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
						Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain ****	%	N/A	100	100	355.291.000	100	394.373.000	100	414.269.000	100	564.202.000	100	613.943.000	Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							355.291.000		394.373.000		414.269.000		564.202.000		613.943.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	N/A	4	4	355.291.000	4	394.373.000	4	414.269.000	4	564.202.000	4	613.943.000	Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									245.465.000		272.466.000		286.212.000		389.798.000		424.164.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I ***	%	N/A	100	100	245.465.000	100	272.466.000	100	286.212.000	100	389.798.000	100	424.164.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								245.465.000		272.466.000		286.212.000		389.798.000		424.164.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I ****	%	N/A	100	100	245.465.000	100	272.466.000	100	286.212.000	100	389.798.000	100	424.164.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							245.465.000		272.466.000		286.212.000		389.798.000		424.164.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	245.465.000	4	272.466.000	4	286.212.000	4	389.798.000	4	424.164.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									231.300.000		256.743.000		269.695.000		367.304.000		399.686.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tercapainya Pendapatan	Persentase Capaian Pendapatan	%	N/A	100	100	231.300.000	100	256.743.000	100	269.695.000	100	367.304.000	100	399.686.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Retribusi Daerah UPPD Semarang II	Retribusi Daerah UPPD Semarang II ***														Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								231.300.000		256.743.000		269.695.000		367.304.000		399.686.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II ****	%	N/A	100	100	231.300.000	100	256.743.000	100	269.695.000	100	367.304.000	100	399.686.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							231.300.000		256.743.000		269.695.000		367.304.000		399.686.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	231.300.000	4	256.743.000	4	269.695.000	4	367.304.000	4	399.686.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN									212.158.000		235.496.000		247.376.000		336.907.000		366.609.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			PENDAPATAN DAERAH ***																		Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III ***	%	N/A	100	100	212.158.000	100	235.496.000	100	247.376.000	100	336.907.000	100	366.609.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								212.158.000		235.496.000		247.376.000		336.907.000		366.609.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III ****	%	N/A	100	100	212.158.000	100	235.496.000	100	247.376.000	100	336.907.000	100	366.609.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							212.158.000		235.496.000		247.376.000		336.907.000		366.609.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	212.158.000	4	235.496.000	4	247.376.000	4	336.907.000	4	366.609.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									210.201.000		233.324.000		245.094.000		333.799.000		363.227.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran ***	%	N/A	100	100	210.201.000	100	233.324.000	100	245.094.000	100	333.799.000	100	363.227.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								210.201.000		233.324.000		245.094.000		333.799.000		363.227.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran ****	%	N/A	100	100	210.201.000	100	233.324.000	100	245.094.000	100	333.799.000	100	363.227.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							210.201.000		233.324.000		245.094.000		333.799.000		363.227.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Terlaksananya Pembinaan dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	Laporan	4	4	4	210.201.000	4	233.324.000	4	245.094.000	4	333.799.000	4	363.227.000	SEKSI PELAYAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****															AN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									166.678.000		185.012.000		194.346.000		264.685.000		288.019.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga ***	%	N/A	100	100	166.678.000	100	185.012.000	100	194.346.000	100	264.685.000	100	288.019.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								166.678.000		185.012.000		194.346.000		264.685.000		288.019.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga ****	%	N/A	100	100	166.678.000	100	185.012.000	100	194.346.000	100	264.685.000	100	288.019.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							166.678.000		185.012.000		194.346.000		264.685.000		288.019.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Salatiga
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	166.678.000	4	185.012.000	4	194.346.000	4	264.685.000	4	288.019.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									197.044.000		218.719.000		229.753.000		312.906.000		340.492.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal ***	%	N/A	100	100	197.044.000	100	218.719.000	100	229.753.000	100	312.906.000	100	340.492.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								197.044.000		218.719.000		229.753.000		312.906.000		340.492.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD kendal ****	%	N/A	100	100	197.044.000	100	218.719.000	100	229.753.000	100	312.906.000	100	340.492.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan							197.044.000		218.719.000		229.753.000		312.906.000		340.492.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	197.044.000	4	218.719.000	4	229.753.000	4	312.906.000	4	340.492.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									254.127.000		282.081.000		296.312.000		403.554.000		439.132.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak ***	%	N/A	100	100	254.127.000	100	282.081.000	100	296.312.000	100	403.554.000	100	439.132.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								254.127.000		282.081.000		296.312.000		403.554.000		439.132.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak ****	%	N/A	100	100	254.127.000	100	282.081.000	100	296.312.000	100	403.554.000	100	439.132.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					ATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							254.127.000		282.081.000		296.312.000		403.554.000		439.132.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	254.127.000	4	282.081.000	4	296.312.000	4	403.554.000	4	439.132.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									160.650.000		178.322.000		187.318.000		255.112.000		277.603.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi ***	%	N/A	100	100	160.650.000	100	178.322.000	100	187.318.000	100	255.112.000	100	277.603.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								160.650.000		178.322.000		187.318.000		255.112.000		277.603.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah	%	N/A	100	100	160.650.000	100	178.322.000	100	187.318.000	100	255.112.000	100	277.603.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
							UPPD Purwodadi ****														I, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							160.650.000		178.322.000		187.318.000		255.112.000		277.603.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	160.650.000	4	178.322.000	4	187.318.000	4	255.112.000	4	277.603.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									209.886.000		232.973.000		244.727.000		333.299.000		362.683.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta ***	%	N/A	100	100	209.886.000	100	232.973.000	100	244.727.000	100	333.299.000	100	362.683.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								209.886.000		232.973.000		244.727.000		333.299.000		362.683.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Surakarta
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta ****	%	N/A	100	100	209.886.000	100	232.973.000	100	244.727.000	100	333.299.000	100	362.683.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							209.886.000		232.973.000		244.727.000		333.299.000		362.683.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	209.886.000	4	232.973.000	4	244.727.000	4	333.299.000	4	362.683.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									201.314.000		223.458.000		234.733.000		319.687.000		347.870.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten ***	%	N/A	100	100	201.314.000	100	223.458.000	100	234.733.000	100	319.687.000	100	347.870.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelol								201.314.000		223.458.000		234.733.000		319.687.000		347.870.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				aan Pendapatan Daerah ****																	n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten ****	%	N/A	100	100	201.314.000	100	223.458.000	100	234.733.000	100	319.687.000	100	347.870.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							201.314.000		223.458.000		234.733.000		319.687.000		347.870.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	201.314.000	4	223.458.000	4	234.733.000	4	319.687.000	4	347.870.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									215.586.000		239.301.000		251.374.000		342.351.000		372.533.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen ***	%	N/A	100	100	215.586.000	100	239.301.000	100	251.374.000	100	342.351.000	100	372.533.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Sragen
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								215.586.000		239.301.000		251.374.000		342.351.000		372.533.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen ****	%	N/A	100	100	215.586.000	100	239.301.000	100	251.374.000	100	342.351.000	100	372.533.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							215.586.000		239.301.000		251.374.000		342.351.000		372.533.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	215.586.000	4	239.301.000	4	251.374.000	4	342.351.000	4	372.533.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									181.976.000		201.993.000		212.184.000		288.978.000		314.455.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tercapainya Pendapatan	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah	%	N/A	100	100	181.976.000	100	201.993.000	100	212.184.000	100	288.978.000	100	314.455.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	UPPD Sukoharjo ***														n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								181.976.000		201.993.000		212.184.000		288.978.000		314.455.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo ****	%	N/A	100	100	181.976.000	100	201.993.000	100	212.184.000	100	288.978.000	100	314.455.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							181.976.000		201.993.000		212.184.000		288.978.000		314.455.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	181.976.000	4	201.993.000	4	212.184.000	4	288.978.000	4	314.455.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									201.295.000		223.437.000		234.710.000		319.656.000		347.838.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Wonogiri
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri ***	%	N/A	100	100	201.295.000	100	223.437.000	100	234.710.000	100	319.656.000	100	347.838.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								201.295.000		223.437.000		234.710.000		319.656.000		347.838.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri ****	%	N/A	100	100	201.295.000	100	223.437.000	100	234.710.000	100	319.656.000	100	347.838.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							201.295.000		223.437.000		234.710.000		319.656.000		347.838.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	201.295.000	4	223.437.000	4	234.710.000	4	319.656.000	4	347.838.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGEL									180.418.000		200.264.000		210.368.000		286.503.000		311.762.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			OLAAN PENDAPATAN DAERAH ***																		n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar ***	%	N/A	100	100	180.418.000	100	200.264.000	100	210.368.000	100	286.503.000	100	311.762.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								180.418.000		200.264.000		210.368.000		286.503.000		311.762.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar ****	%	N/A	100	100	180.418.000	100	200.264.000	100	210.368.000	100	286.503.000	100	311.762.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							180.418.000		200.264.000		210.368.000		286.503.000		311.762.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	180.418.000	4	200.264.000	4	210.368.000	4	286.503.000	4	311.762.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Karanganyar
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									158.775.000		176.241.000		185.131.000		252.135.000		274.364.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali ***	%	N/A	100	100	158.775.000	100	176.241.000	100	185.131.000	100	252.135.000	100	274.364.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								158.775.000		176.241.000		185.131.000		252.135.000		274.364.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali ****	%	N/A	100	100	158.775.000	100	176.241.000	100	185.131.000	100	252.135.000	100	274.364.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							158.775.000		176.241.000		185.131.000		252.135.000		274.364.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	4	4	4	158.775.000	4	176.241.000	4	185.131.000	4	252.135.000	4	274.364.000	SEKSI PELAYAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Retribusi Daerah *****														RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									195.400.000		216.894.000		227.836.000		310.295.000		337.651.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati ***	%	N/A	100	100	195.400.000	100	216.894.000	100	227.836.000	100	310.295.000	100	337.651.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								195.400.000		216.894.000		227.836.000		310.295.000		337.651.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati ****	%	N/A	100	100	195.400.000	100	216.894.000	100	227.836.000	100	310.295.000	100	337.651.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							195.400.000		216.894.000		227.836.000		310.295.000		337.651.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Pati
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	195.400.000	4	216.894.000	4	227.836.000	4	310.295.000	4	337.651.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									175.230.000		194.505.000		204.318.000		278.265.000		302.797.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora ***	%	N/A	100	100	175.230.000	100	194.505.000	100	204.318.000	100	278.265.000	100	302.797.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								175.230.000		194.505.000		204.318.000		278.265.000		302.797.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora ****	%	N/A	100	100	175.230.000	100	194.505.000	100	204.318.000	100	278.265.000	100	302.797.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan							175.230.000		194.505.000		204.318.000		278.265.000		302.797.000	Badan Pengelola Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****																n Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	175.230.000	4	194.505.000	4	204.318.000	4	278.265.000	4	302.797.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									224.425.000		249.112.000		261.680.000		356.387.000		387.807.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang ***	%	N/A	100	100	224.425.000	100	249.112.000	100	261.680.000	100	356.387.000	100	387.807.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								224.425.000		249.112.000		261.680.000		356.387.000		387.807.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang ****	%	N/A	100	100	224.425.000	100	249.112.000	100	261.680.000	100	356.387.000	100	387.807.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							224.425.000		249.112.000		261.680.000		356.387.000		387.807.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	224.425.000	4	249.112.000	4	261.680.000	4	356.387.000	4	387.807.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									153.876.000		170.803.000		179.419.000		244.355.000		265.897.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus ***	%	N/A	100	100	153.876.000	100	170.803.000	100	179.419.000	100	244.355.000	100	265.897.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								153.876.000		170.803.000		179.419.000		244.355.000		265.897.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus ****	%	N/A	100	100	153.876.000	100	170.803.000	100	179.419.000	100	244.355.000	100	265.897.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI,

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							153.876.000		170.803.000		179.419.000		244.355.000		265.897.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	153.876.000	4	170.803.000	4	179.419.000	4	244.355.000	4	265.897.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									198.215.000		220.019.000		231.119.000		314.765.000		342.516.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara ***	%	N/A	100	100	198.215.000	100	220.019.000	100	231.119.000	100	314.765.000	100	342.516.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								198.215.000		220.019.000		231.119.000		314.765.000		342.516.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara ****	%	N/A	100	100	198.215.000	100	220.019.000	100	231.119.000	100	314.765.000	100	342.516.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							198.215.000		220.019.000		231.119.000		314.765.000		342.516.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	198.215.000	4	220.019.000	4	231.119.000	4	314.765.000	4	342.516.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									178.382.000		198.005.000		207.994.000		283.271.000		308.244.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan ***	%	N/A	100	100	178.382.000	100	198.005.000	100	207.994.000	100	283.271.000	100	308.244.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan								178.382.000		198.005.000		207.994.000		283.271.000		308.244.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Daerah ****																	Pendapatan Daerah Pekalongan
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan ****	%	N/A	100	100	178.382.000	100	198.005.000	100	207.994.000	100	283.271.000	100	308.244.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							178.382.000		198.005.000		207.994.000		283.271.000		308.244.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	N/A	4	4	178.382.000	4	198.005.000	4	207.994.000	4	283.271.000	4	308.244.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									196.197.000		217.779.000		228.766.000		311.561.000		339.028.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen ***	%	N/A	100	100	196.197.000	100	217.779.000	100	228.766.000	100	311.561.000	100	339.028.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								196.197.000		217.779.000		228.766.000		311.561.000		339.028.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen ****	%	N/A	100	100	196.197.000	100	217.779.000	100	228.766.000	100	311.561.000	100	339.028.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							196.197.000		217.779.000		228.766.000		311.561.000		339.028.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	N/A	4	4	196.197.000	4	217.779.000	4	228.766.000	4	311.561.000	4	339.028.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									179.911.000		199.701.000		209.776.000		285.699.000		310.886.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang ***	%	N/A	100	100	179.911.000	100	199.701.000	100	209.776.000	100	285.699.000	100	310.886.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								179.911.000		199.701.000		209.776.000		285.699.000		310.886.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang ****	%	N/A	100	100	179.911.000	100	199.701.000	100	209.776.000	100	285.699.000	100	310.886.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							179.911.000		199.701.000		209.776.000		285.699.000		310.886.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	N/A	4	4	179.911.000	4	199.701.000	4	209.776.000	4	285.699.000	4	310.886.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									208.264.000		231.174.000		242.836.000		330.724.000		359.881.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang ***	%	N/A	100	100	208.264.000	100	231.174.000	100	242.836.000	100	330.724.000	100	359.881.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								208.264.000		231.174.000		242.836.000		330.724.000		359.881.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang ****	%	N/A	100	100	208.264.000	100	231.174.000	100	242.836.000	100	330.724.000	100	359.881.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							208.264.000		231.174.000		242.836.000		330.724.000		359.881.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	N/A	4	4	208.264.000	4	231.174.000	4	242.836.000	4	330.724.000	4	359.881.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAP									187.082.000		207.661.000		218.138.000		297.086.000		323.278.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			ATAN DAERAH ***																		Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal ***	%	N/A	100	100	187.082.000	100	207.661.000	100	218.138.000	100	297.086.000	100	323.278.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								187.082.000		207.661.000		218.138.000		297.086.000		323.278.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal ****	%	N/A	100	100	187.082.000	100	207.661.000	100	218.138.000	100	297.086.000	100	323.278.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							187.082.000		207.661.000		218.138.000		297.086.000		323.278.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	N/A	4	4	187.082.000	4	207.661.000	4	218.138.000	4	297.086.000	4	323.278.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									167.387.000		185.800.000		293.599.000		265.810.000		289.245.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi ***	%	N/A	100	100	167.387.000	100	185.800.000	100	293.599.000	100	265.810.000	100	289.245.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								167.387.000		185.800.000		293.599.000		265.810.000		289.245.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi ****	%	N/A	100	100	167.387.000	100	185.800.000	100	293.599.000	100	265.810.000	100	289.245.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							167.387.000		185.800.000		293.599.000		265.810.000		289.245.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	N/A	4	4	167.387.000	4	185.800.000	4	293.599.000	4	265.810.000	4	289.245.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									185.288.000		205.670.000		216.046.000		294.237.000		320.178.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes ***	%	N/A	100	100	185.288.000	100	205.670.000	100	216.046.000	100	294.237.000	100	320.178.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								185.288.000		205.670.000		216.046.000		294.237.000		320.178.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes ****	%	N/A	100	100	185.288.000	100	205.670.000	100	216.046.000	100	294.237.000	100	320.178.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							185.288.000		205.670.000		216.046.000		294.237.000		320.178.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Terlaksananya Pembinaan dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	Laporan	N/A	4	4	185.288.000	4	205.670.000	4	216.046.000	4	294.237.000	4	320.178.000	SEKSI PELAYAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****															AN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									215.750.000		239.483.000		251.564.000		342.611.000		372.816.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto ***	%	N/A	100	100	215.750.000	100	239.483.000	100	251.564.000	100	342.611.000	100	372.816.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								215.750.000		239.483.000		251.564.000		342.611.000		372.816.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto ****	%	N/A	100	100	215.750.000	100	239.483.000	100	251.564.000	100	342.611.000	100	372.816.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							215.750.000		239.483.000		251.564.000		342.611.000		372.816.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pendapatan Daerah Banyumas
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	215.750.000	4	239.483.000	4	251.564.000	4	342.611.000	4	372.816.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									176.865.000		196.321.000		206.224.000		280.861.000		305.622.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap ***	%	N/A	100	100	176.865.000	100	196.321.000	100	206.224.000	100	280.861.000	100	305.622.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								176.865.000		196.321.000		206.224.000		280.861.000		305.622.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap ****	%	N/A	100	100	176.865.000	100	196.321.000	100	206.224.000	100	280.861.000	100	305.622.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan							176.865.000		196.321.000		206.224.000		280.861.000		305.622.000	Badan Pengelola

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
					Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****																Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	176.865.000	4	196.321.000	4	206.224.000	4	280.861.000	4	305.622.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									184.270.000		204.540.000		214.859.000		292.621.000		318.419.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga ***	%	N/A	100	100	184.270.000	100	204.540.000	100	214.859.000	100	292.621.000	100	318.419.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								184.270.000		204.540.000		214.859.000		292.621.000		318.419.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga ****	%	N/A	100	100	184.270.000	100	204.540.000	100	214.859.000	100	292.621.000	100	318.419.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					TAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							184.270.000		204.540.000		214.859.000		292.621.000		318.419.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	184.270.000	4	204.540.000	4	214.859.000	4	292.621.000	4	318.419.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									185.574.000		205.987.000		216.380.000		294.692.000		320.672.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara ***	%	N/A	100	100	185.574.000	100	205.987.000	100	216.380.000	100	294.692.000	100	320.672.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								185.574.000		205.987.000		216.380.000		294.692.000		320.672.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Banjarnegara
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara ****	%	N/A	100	100	185.574.000	100	205.987.000	100	216.380.000	100	294.692.000	100	320.672.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							185.574.000		205.987.000		216.380.000		294.692.000		320.672.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	185.574.000	4	205.987.000	4	216.380.000	4	294.692.000	4	320.672.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									184.581.000		204.885.000		215.221.000		293.114.000		318.956.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang ***	%	N/A	100	100	184.581.000	100	204.885.000	100	215.221.000	100	293.114.000	100	318.956.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								184.581.000		204.885.000		215.221.000		293.114.000		318.956.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang ****	%	N/A	100	100	184.581.000	100	204.885.000	100	215.221.000	100	293.114.000	100	318.956.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							184.581.000		204.885.000		215.221.000		293.114.000		318.956.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	184.581.000	4	204.885.000	4	215.221.000	4	293.114.000	4	318.956.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									185.309.000		205.693.000		216.070.000		294.270.000		320.214.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid ***	%	N/A	100	100	185.309.000	100	205.693.000	100	216.070.000	100	294.270.000	100	320.214.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								185.309.000		205.693.000		216.070.000		294.270.000		320.214.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid ****	%	N/A	100	100	185.309.000	100	205.693.000	100	216.070.000	100	294.270.000	100	320.214.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							185.309.000		205.693.000		216.070.000		294.270.000		320.214.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	185.309.000	4	205.693.000	4	216.070.000	4	294.270.000	4	320.214.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									199.372.000		221.303.000		232.468.000		316.603.000		344.515.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen ***	%	N/A	100	100	199.372.000	100	221.303.000	100	232.468.000	100	316.603.000	100	344.515.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								199.372.000		221.303.000		232.468.000		316.603.000		344.515.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen ****	%	N/A	100	100	199.372.000	100	221.303.000	100	232.468.000	100	316.603.000	100	344.515.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							199.372.000		221.303.000		232.468.000		316.603.000		344.515.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	199.372.000	4	221.303.000	4	232.468.000	4	316.603.000	4	344.515.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAP									174.020.000		193.162.000		202.908.000		276.343.000		300.706.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			ATAN DAERAH ***																		Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo ***	%	N/A	100	100	174.020.000	100	193.162.000	100	202.908.000	100	276.343.000	100	300.706.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								174.020.000		193.162.000		202.908.000		276.343.000		300.706.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo ****	%	N/A	100	100	174.020.000	100	193.162.000	100	202.908.000	100	276.343.000	100	300.706.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							174.020.000		193.162.000		202.908.000		276.343.000		300.706.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	174.020.000	4	193.162.000	4	202.908.000	4	276.343.000	4	300.706.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									167.593.000		186.028.000		195.413.000		266.137.000		289.601.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung ***	%	N/A	100	100	167.593.000	100	186.028.000	100	195.413.000	100	266.137.000	100	289.601.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								167.593.000		186.028.000		195.413.000		266.137.000		289.601.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung ****	%	N/A	100	100	167.593.000	100	186.028.000	100	195.413.000	100	266.137.000	100	289.601.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							167.593.000		186.028.000		195.413.000		266.137.000		289.601.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	4	4	4	167.593.000	4	186.028.000	4	195.413.000	4	266.137.000	4	289.601.000	SEKSI PELAYAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
						Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Retribusi Daerah *****														RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ***									177.233.000		196.729.000		206.654.000		281.446.000		306.258.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo ***	%	N/A	100	100	177.233.000	100	196.729.000	100	206.654.000	100	281.446.000	100	306.258.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ****								177.233.000		196.729.000		206.654.000		281.446.000		306.258.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo ****	%	N/A	100	100	177.233.000	100	196.729.000	100	206.654.000	100	281.446.000	100	306.258.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *****							177.233.000		196.729.000		206.654.000		281.446.000		306.258.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											2026		2027		2028		2029		2030		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																					n Daerah Wonosobo
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	4	4	4	177.233.000	4	196.729.000	4	206.654.000	4	281.446.000	4	306.258.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Data Diolah Tahun 2025

Tabel IV.2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2030

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Output*/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Mengalokasikan insentif pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai regulasi *)	Teralokasinya insentif pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai regulasi	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretaritat Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
2	Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah	Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala	Tersusunnya kajian potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan pendapatan	
3	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal	Penyusunan Rencana Aksi Pemanfaatan Aset Daerah	Tersusunnya Rencana Aksi Pemanfaatan aset daerah	Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : Penilaian Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Promosi Pemanfaatan Aset Daerah	Terlaksananya promosi pemanfaatan aset	Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : Penilaian Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Output*/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Aset	Terlaksanya kerjasama pengelolaan aset	Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : Penilaian Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima *)	Perbaikan Tata Kelola SAMSAT untuk memaksimalkan pendapatan daerah	Terlaksananya Tata kelola samsat	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan dan Pengembangan pendapatan	
		Mengalokasikan insentif pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai regulasi *)	Teralokasinya insentif pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai regulasi	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretaritat Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		Peningkatan sarpras dan SDM pelayanan dan fasilitas SAMSAT	Tersedianya sarana prasarana dan SDM pelayanan dan fasilitas SAMSAT	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretaritat Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Data Diolah Tahun 2025

4.2 Kinerja Pengelenggaraan Bidang Urusan Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggaraan bidang urusan dari pihak Bapenda Provinsi Jawa Tengah adalah semua pihak yang terkait untuk melaksanakan aktivitas penerimaan pendapatan yang sudah diatur menggunakan regulasi yang berlaku. Secara definisi kinerja adalah capaian keluaran atau hasil atau dampak dari kegiatan program atau sasaran yang memiliki korelasi dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan. program. atau sasaran. dan tujuan baik dalam bentuk keluaran (output). hasil (outcome). dampak (impact) disebut indikator kinerja.

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. sehingga bentuknya cenderung kualitatif. walaupun harus tetap dapat diukur tingkat keberhasilannya. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja dari pihak terkait. Oleh karena itu. target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific. measurable. achievable. relevant. time bond dan continously improve. Spesifik berarti tujuan harus spesifik dan jelas. dengan definisi yang tepat tentang apa yang ingin dicapai. Measurable artinya tujuan harus dapat diukur sehingga dapat diketahui mengenai kemajuan dan perlunya dilakukan evaluasi apakah tujuan telah tercapai. Achievable yaitu tujuan harus realistis dan dapat dicapai dalam waktu tertentu dengan sumber daya yang dimiliki. Relevan artinya tujuan harus relevan dengan periode yang lebih panjang. Time-bound yaitu tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas agar dapat memberikan dorongan untuk fokus dan menjadi motivasi untuk segera tercapainya tujuan. Continously improve artinya adalah terdapat perbaikan secara terus menerus untuk mencapai kinerja terbaik.

Penyajian Indikator kinerja Bapenda Provinsi Jawa Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dapat di lihat pada tabel IV.3 dan tabel IV.4 berikut ini.

Tabel IV.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun						Ket.
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	3.45	13.53	6.81	8.91	15.75	23.02	30.75	38.94	
2	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain	8.14	23.82	-15.95	-6.63	-0.61	6.70	13.15	18.57	

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Data Diolah Tahun 2025

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Kunci Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket.
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Persentase Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	67,06	66,91	63,25	65,72	66,80	67,89	68,90	69,84	

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Data Diolah Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Bapenda
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng

BAB V
PENUTUP

Renstra Bapenda Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun. yang memuat tujuan. sasaran. program. dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. dengan berpedoman kepada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 0007/0001565 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok organisasi. yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang urusan keuangan sub fungsi pendapatan daerah yang bertujuan untuk memperkuat otonomi fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah. Rencana strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 juga akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berikutnya periodisasi Renstra Bapenda Provinsi Jawa Tengah tahun adalah tahun 2025 sampai dengan 2029. Sesuai dengan prinsip otonomi pada pengelolaan keuangan negara. daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. serta mengelola dan menggunakan keuangan yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Akhirnya Ketergantungan kepada bantuan pusat idealnya seminimal mungkin. Oleh karenanya PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Keberhasilan kinerja Bapenda Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak yang ada dalam. terutama keseriusan untuk melaksanakan Rencana Strategis tersebut dengan penuh tanggungjawab. Selain itu ditentukan pula oleh kemampuan. kesiapan. dan profesionalisme serta sikap mental sumberdaya Aparatur Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari seluruh aparatur Bapenda Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan realisasi kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN

Bapenda
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng

LAMPIRAN

LAMPIRAN I POHON KINERJA BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II CASCADING BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN III MANAJEMEN RISIKO BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I POHON KINERJA BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

POHON KINERJA
BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

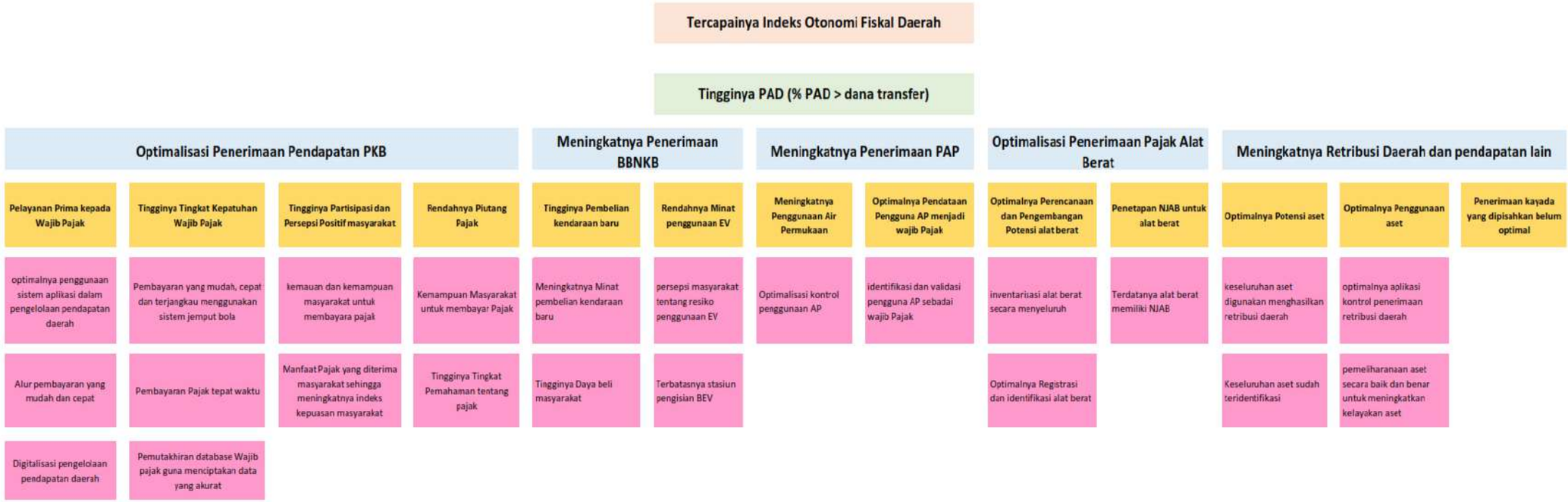

LAMPIRAN II CASCADING BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

CASCADING
BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

TUJUAN	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Indikator Kinerja Tujuan	IK : Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
SASARAN	1. Tumbuhnya Pendapatan Pajak Daerah 2. Tumbuhnya Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain
Indikator Kinerja Sasaran	IK : 1. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah 2. Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain

PROGRAM	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Program	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah		Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah			Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kegiatan	Persentase Terlaksananya Analisis Data dan Perencanaan Pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pendataan. Pendaftaran. dan Penetapan Pajak Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Tersusunnya Kebijakan Penilaian Barang Milik Daerah
SUB KEGIATAN	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
	SUBBIDANG ANALISIS DATA DAN PERENCANAAN PENDAPATAN	SUBBIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN	SUBBIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK	SUBBIDANG KEBERATAN DAN PENAGIHAN PAJAK		SUBBIDANG PENGELOLAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	SUB BIDANG PEMANFAATAN ASET
UNIT KERJA	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN		BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH			BIDANG PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH. PENDAPATAN LAIN. DAN PEMANFAATAN ASET	

PROGRAM	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Program	Persentase Terlaksananya Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah. Retribusi Daerah. Pendapatan Lain. dan Pemanfaatan Aset	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah		
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kegiatan	Persentase Terlaksananya Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Terlaksananya Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi Daerah. Pendapatan Lain. dan Pemanfaatan Aset	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah		Persentase Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN	Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
	SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PAJAK	SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI DAERAH. PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI		KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIT KERJA	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI		UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		UNIT PENGELOLAAN BASIS DATA PAJAK DAN RETRIBUSI		

MANAJEMEN RESIKO
BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

A. Indentifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Sasaran Strategis	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	Risiko Strategis	Pandangan Masyarakat yang negatif terkait pajak	Meningkatnya piutang pajak daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran Strategis	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Potensi pajak alat berat tidak maksimal	Risiko Strategis	Belum optimalnya inventarisasi pajak alat berat	Belum optimalnya penerimaan pajak alat berat	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3	Sasaran Strategis	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Penjualan kendaraan baru menurun	Risiko Operasional	Daya beli masyarakat menurun	Pendapatan BBNKB tidak mencapai target	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	Sasaran Strategis	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Tingginya piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Risiko Hukum	Proses penagihan tidak optimal	Tingginya piutang akan berpotensi menurunkan realisasi pajak daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5	Sasaran Program	Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Berkurangnya potensi pungutan retribusi daerah	Risiko Operasional	Masih banyak aset tidak layak untuk di-retribusikan	Penurunan pencapaian realisasi retribusi daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
6	Sasaran Program	Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah	Risiko Operasional	Data objek retribusi belum sempurna	Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

B. Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	5	4	20	Ada	Meningkatkan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak dari frekuensi dan cakupan	Memadai	4	4	16
Potensi pajak alat berat tidak maksimal	3	3	9	Ada	Optimalisasi inventarisasi alat berat	Memadai	2	2	4
Penjualan kendaraan baru menurun	5	4	20	Ada	bekerjasama dengan asosiasi industry otomotif	Memadai	4	4	16
Tingginya piutang Pajak Kendaraan Bermotor	4	4	16	Ada	Optimalisasi program penanganan piutang pajak daerah	Memadai	3	3	9
Berkurangnya potensi pungutan retribusi daerah	4	3	12	Ada	Optimalisasi sumber pendapatan lain dan perbaikan aset	Memadai	3	3	9
Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah	3	3	9	Ada	Perbaikan sistem informasi tata kelola retribusi daerah	Memadai	3	2	6

C. Penetapan Risiko Prioritas

Risiko prioritas merupakan risiko yang akan dilakukan tindak pengendalian lebih lanjut. Penetapan risiko prioritas berdasarkan pada skala atau level risiko serta selera risiko yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi. dan/atau kategori sedang.

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	16	Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah	Pandangan Masyarakat yang negatif terkait pajak	Meningkatnya piutang pajak daerah
Penjualan kendaraan baru menurun	16	Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah	Daya beli masyarakat menurun	Pendapatan BBNKB tidak mencapai target

D. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Rencana Tindak Pengendalian ini yang menjadi dasar dalam memastikan bahwa perencanaan yang disusun telah berbasis pada risiko. RTP untuk risiko strategis dituangkan dalam Bab III Renstra PD.

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	16	Pandangan Masyarakat yang negatif terkait pajak	Meningkatnya piutang pajak daerah	Sosialisasi kepatuhan dan pemberian insentif pajak	Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah	Setiap tahun
Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Penjualan kendaraan baru menurun	16	Daya beli masyarakat menurun	Pendapatan BBNKB tidak mencapai target	Melakukan pameran automotif	Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah	Setiap tahun

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN

Bapenda
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng

LAMPIRAN

LAMPIRAN I POHON KINERJA BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II CASCADING BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN III MANAJEMEN RISIKO BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I POHON KINERJA BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

POHON KINERJA
BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

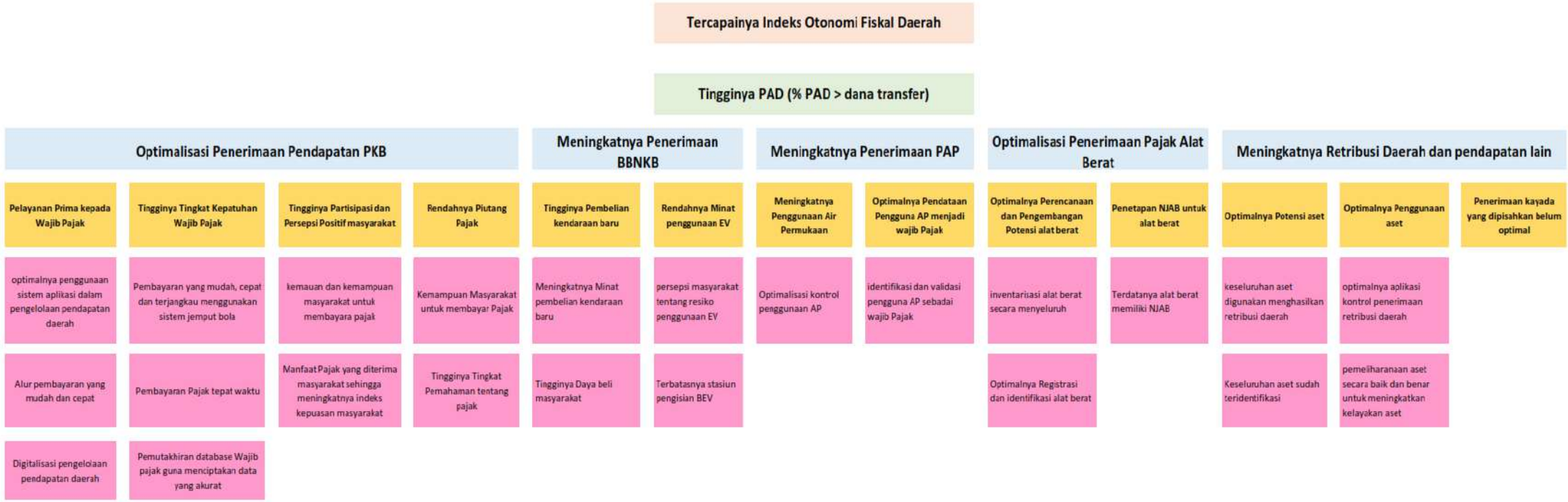

LAMPIRAN II CASCADING BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

CASCADING
BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

TUJUAN: Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Indikator Kinerja Tujuan: IK : Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

SASARAN:
1. Tumbuhnya Pendapatan Pajak Daerah
2. Tumbuhnya Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain

Indikator Kinerja Sasaran: IK :
1. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah
2. Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain

UNIT KERJA: BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN
- **PROGRAM:** Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- **Indikator Program:** Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
- **KEGIATAN:** Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- **Indikator Kegiatan / SUB KEGIATAN / Indikator Sub Kegiatan / Unit:**
  - Persentase Terlaksananya Analisis Data dan Perencanaan Pendapatan Daerah → Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah → Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah → SUBBIDANG ANALISIS DATA DAN PERENCANAAN PENDAPATAN
  - Persentase Terlaksananya Pengembangan Pendapatan Daerah → Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah → Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah → SUBBIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN

UNIT KERJA: BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
- **PROGRAM:** Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- **Indikator Program:** Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah
- **KEGIATAN:** Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- **Indikator Kegiatan / SUB KEGIATAN / Indikator Sub Kegiatan / Unit:**
  - Persentase Tersusunnya Kebijakan Pendataan. Pendaftaran. dan Penetapan Pajak Daerah → Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah → Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah → SUBBIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
  - Persentase Tersusunnya Kebijakan Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah →
    - Penagihan Pajak Daerah → Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak
    - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah → Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti
    - → SUBBIDANG KEBERATAN DAN PENAGIHAN PAJAK

UNIT KERJA: BIDANG PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH. PENDAPATAN LAIN. DAN PEMANFAATAN ASET
- **PROGRAM:** Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - **Indikator Program:** Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain
  - **KEGIATAN:** Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - **Indikator Kegiatan:** Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain
  - **SUB KEGIATAN:** Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - **Indikator Sub Kegiatan:** Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
  - SUBBIDANG PENGELOLAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN
- **PROGRAM:** Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - **Indikator Program:** Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah
  - **KEGIATAN:** Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - **Indikator Kegiatan:** Persentase Tersusunnya Kebijakan Penilaian Barang Milik Daerah
  - **SUB KEGIATAN:** Penilaian Barang Milik Daerah
  - **Indikator Sub Kegiatan:** Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
  - SUB BIDANG PEMANFAATAN ASET

UNIT KERJA: BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
- **PROGRAM:** Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - **Indikator Program:** Persentase Terlaksananya Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
  - **KEGIATAN:** Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - **Indikator Kegiatan:** Persentase Terlaksananya Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
  - **SUB KEGIATAN:** Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
  - **Indikator Sub Kegiatan:** Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
  - SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PAJAK
- **PROGRAM:** Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - **Indikator Program:** Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah. Retribusi Daerah. Pendapatan Lain. dan Pemanfaatan Aset
  - **KEGIATAN:** Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - **Indikator Kegiatan:** Persentase Terlaksananya Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi Daerah. Pendapatan Lain. dan Pemanfaatan Aset
  - **SUB KEGIATAN:** Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
  - **Indikator Sub Kegiatan:** Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
  - SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET

UNIT KERJA: UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
- **PROGRAM:** Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - **Indikator Program:** Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah
  - **KEGIATAN:** Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - **Indikator Kegiatan:** Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah
  - **SUB KEGIATAN:** Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
  - **Indikator Sub Kegiatan:** Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti
  - SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH
- **PROGRAM:** Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - **Indikator Program:** Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah
  - **KEGIATAN:** Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - **Indikator Kegiatan:** Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah
  - **SUB KEGIATAN:** Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - **Indikator Sub Kegiatan:** Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
  - SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI DAERAH. PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

UNIT KERJA: UNIT PENGELOLAAN BASIS DATA PAJAK DAN RETRIBUSI
- **PROGRAM:** Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- **Indikator Program:** Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- **KEGIATAN:** Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- **Indikator Kegiatan / SUB KEGIATAN / Indikator Sub Kegiatan / Unit:**
  - Persentase Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah →
    - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah → Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
    - Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah → Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
    - → KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
  - Persentase Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah → Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah → Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah → KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI

MANAJEMEN RESIKO
BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

A. Indentifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Sasaran Strategis	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	Risiko Strategis	Pandangan Masyarakat yang negatif terkait pajak	Meningkatnya piutang pajak daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran Strategis	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Potensi pajak alat berat tidak maksimal	Risiko Strategis	Belum optimalnya inventarisasi pajak alat berat	Belum optimalnya penerimaan pajak alat berat	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3	Sasaran Strategis	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Penjualan kendaraan baru menurun	Risiko Operasional	Daya beli masyarakat menurun	Pendapatan BBNKB tidak mencapai target	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	Sasaran Strategis	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Tingginya piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Risiko Hukum	Proses penagihan tidak optimal	Tingginya piutang akan berpotensi menurunkan realisasi pajak daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5	Sasaran Program	Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Berkurangnya potensi pungutan retribusi daerah	Risiko Operasional	Masih banyak aset tidak layak untuk di-retribusikan	Penurunan pencapaian realisasi retribusi daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
6	Sasaran Program	Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah	Risiko Operasional	Data objek retribusi belum sempurna	Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

B. Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	5	4	20	Ada	Meningkatkan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak dari frekuensi dan cakupan	Memadai	4	4	16
Potensi pajak alat berat tidak maksimal	3	3	9	Ada	Optimalisasi inventarisasi alat berat	Memadai	2	2	4
Penjualan kendaraan baru menurun	5	4	20	Ada	bekerjasama dengan asosiasi industry otomotif	Memadai	4	4	16
Tingginya piutang Pajak Kendaraan Bermotor	4	4	16	Ada	Optimalisasi program penanganan piutang pajak daerah	Memadai	3	3	9
Berkurangnya potensi pungutan retribusi daerah	4	3	12	Ada	Optimalisasi sumber pendapatan lain dan perbaikan aset	Memadai	3	3	9
Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah	3	3	9	Ada	Perbaikan sistem informasi tata kelola retribusi daerah	Memadai	3	2	6

C. Penetapan Risiko Prioritas

Risiko prioritas merupakan risiko yang akan dilakukan tindak pengendalian lebih lanjut. Penetapan risiko prioritas berdasarkan pada skala atau level risiko serta selera risiko yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi. dan/atau kategori sedang.

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	16	Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah	Pandangan Masyarakat yang negatif terkait pajak	Meningkatnya piutang pajak daerah
Penjualan kendaraan baru menurun	16	Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah	Daya beli masyarakat menurun	Pendapatan BBNKB tidak mencapai target

D. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Rencana Tindak Pengendalian ini yang menjadi dasar dalam memastikan bahwa perencanaan yang disusun telah berbasis pada risiko. RTP untuk risiko strategis dituangkan dalam Bab III Renstra PD.

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	16	Pandangan Masyarakat yang negatif terkait pajak	Meningkatnya piutang pajak daerah	Sosialisasi kepatuhan dan pemberian insentif pajak	Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah	Setiap tahun
Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Penjualan kendaraan baru menurun	16	Daya beli masyarakat menurun	Pendapatan BBNKB tidak mencapai target	Melakukan pameran automotif	Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah	Setiap tahun

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN

Bapenda
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng

LAMPIRAN

LAMPIRAN I POHON KINERJA BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II CASCADING BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN III MANAJEMEN RISIKO BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I POHON KINERJA BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

POHON KINERJA
BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

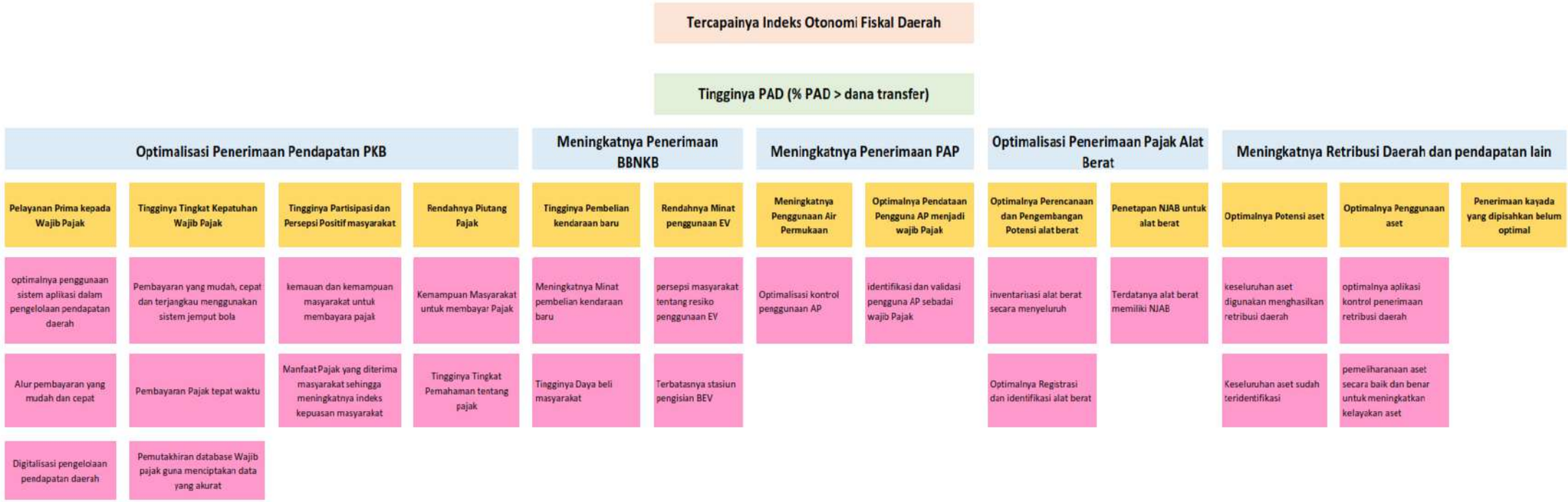

LAMPIRAN II CASCADING BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

CASCADING
BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

TUJUAN	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Indikator Kinerja Tujuan	IK : Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
SASARAN	1. Tumbuhnya Pendapatan Pajak Daerah 2. Tumbuhnya Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain
Indikator Kinerja Sasaran	IK : 1. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah 2. Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain

UNIT KERJA: BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN

PROGRAM	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
Indikator Program	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
Indikator Kegiatan	Persentase Terlaksananya Analisis Data dan Perencanaan Pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengembangan Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
	SUBBIDANG ANALISIS DATA DAN PERENCANAAN PENDAPATAN	SUBBIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN

UNIT KERJA: BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

PROGRAM	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Program	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah		
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kegiatan	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pendataan. Pendaftaran. dan Penetapan Pajak Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
SUB KEGIATAN	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti
	SUBBIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK	SUBBIDANG KEBERATAN DAN PENAGIHAN PAJAK	

UNIT KERJA: BIDANG PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH. PENDAPATAN LAIN. DAN PEMANFAATAN ASET

PROGRAM	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Program	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kegiatan	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Tersusunnya Kebijakan Penilaian Barang Milik Daerah
SUB KEGIATAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
	SUBBIDANG PENGELOLAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	SUB BIDANG PEMANFAATAN ASET

UNIT KERJA: BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PROGRAM	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Program	Persentase Terlaksananya Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah. Retribusi Daerah. Pendapatan Lain. dan Pemanfaatan Aset
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kegiatan	Persentase Terlaksananya Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Terlaksananya Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi Daerah. Pendapatan Lain. dan Pemanfaatan Aset
SUB KEGIATAN	Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PAJAK	SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET

UNIT KERJA: UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PROGRAM	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Program	Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Kegiatan	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah
SUB KEGIATAN	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI DAERAH. PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

UNIT KERJA: UNIT PENGELOLAAN BASIS DATA PAJAK DAN RETRIBUSI

PROGRAM	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Program	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah		
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kegiatan	Persentase Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah		Persentase Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
	KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI		KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI

MANAJEMEN RESIKO
BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH

A. Indentifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Sasaran Strategis	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	Risiko Strategis	Pandangan Masyarakat yang negatif terkait pajak	Meningkatnya piutang pajak daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran Strategis	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Potensi pajak alat berat tidak maksimal	Risiko Strategis	Belum optimalnya inventarisasi pajak alat berat	Belum optimalnya penerimaan pajak alat berat	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3	Sasaran Strategis	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Penjualan kendaraan baru menurun	Risiko Operasional	Daya beli masyarakat menurun	Pendapatan BBNKB tidak mencapai target	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	Sasaran Strategis	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Tingginya piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Risiko Hukum	Proses penagihan tidak optimal	Tingginya piutang akan berpotensi menurunkan realisasi pajak daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5	Sasaran Program	Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Berkurangnya potensi pungutan retribusi daerah	Risiko Operasional	Masih banyak aset tidak layak untuk di-retribusikan	Penurunan pencapaian realisasi retribusi daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
6	Sasaran Program	Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah	Risiko Operasional	Data objek retribusi belum sempurna	Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

B. Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	5	4	20	Ada	Meningkatkan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak dari frekuensi dan cakupan	Memadai	4	4	16
Potensi pajak alat berat tidak maksimal	3	3	9	Ada	Optimalisasi inventarisasi alat berat	Memadai	2	2	4
Penjualan kendaraan baru menurun	5	4	20	Ada	bekerjasama dengan asosiasi industry otomotif	Memadai	4	4	16
Tingginya piutang Pajak Kendaraan Bermotor	4	4	16	Ada	Optimalisasi program penanganan piutang pajak daerah	Memadai	3	3	9
Berkurangnya potensi pungutan retribusi daerah	4	3	12	Ada	Optimalisasi sumber pendapatan lain dan perbaikan aset	Memadai	3	3	9
Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah	3	3	9	Ada	Perbaikan sistem informasi tata kelola retribusi daerah	Memadai	3	2	6

C. Penetapan Risiko Prioritas

Risiko prioritas merupakan risiko yang akan dilakukan tindak pengendalian lebih lanjut. Penetapan risiko prioritas berdasarkan pada skala atau level risiko serta selera risiko yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi. dan/atau kategori sedang.

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	16	Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah	Pandangan Masyarakat yang negatif terkait pajak	Meningkatnya piutang pajak daerah
Penjualan kendaraan baru menurun	16	Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah	Daya beli masyarakat menurun	Pendapatan BBNKB tidak mencapai target

D. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Rencana Tindak Pengendalian ini yang menjadi dasar dalam memastikan bahwa perencanaan yang disusun telah berbasis pada risiko. RTP untuk risiko strategis dituangkan dalam Bab III Renstra PD.

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	16	Pandangan Masyarakat yang negatif terkait pajak	Meningkatnya piutang pajak daerah	Sosialisasi kepatuhan dan pemberian insentif pajak	Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah	Setiap tahun
Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Penjualan kendaraan baru menurun	16	Daya beli masyarakat menurun	Pendapatan BBNKB tidak mencapai target	Melakukan pameran automotif	Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah	Setiap tahun

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Periode pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Gubenur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj. Yasin Maimoen pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Masa Jabatan Gubernur Jawa Tengah yang akan dimulai pada tahun 2025, beririsan dengan pelaksanaan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Kondisi tesebut berimplikasi terhadap penyelarasan kembali dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan nasional Presiden terpilih serta Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan pada 6 (enam) misi, yaitu: 1) Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global; 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sector unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsive dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas; 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif; 5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya local, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; dan 6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang selanjutnya menjadi dasar perangkat daerah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, demikian pula dengan Renstra PD akan menjadi pedoman penyusunan Renja PD.

Penyelenggaraan kebijakan di dalam dokumen RPJMD, dilaksanakan melalui Renstra PD, sehingga penyusunan RPJMD bersamaan dengan penyusunan Renstra PD. Renstra PD ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian atau Lembaga Pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penyusunan Renstra PD dilakukan secara transparan, efektif, efisien, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*), serta berbasis risiko (*riskbased planning*).

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui tahapan sebagai berikut: 1) Tahap I meliputi: penyusunan pohon kinerja, cascading, dan manajemen risiko Perangkat Daerah; 2) Tahap II penyusunan dokumen Renstra PD yang meliputi: analisis gambar pelayanan; analisis permasalahan, penelaahan dokumen dan perencanaan lainnya; analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran PD beserta indikator serta target kinerja; perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD; 3) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD; 4) Perumusan rancangan akhir 5) Penyampaian Rancangan Akhir Renstra PD dan Verifikasi ke BAPPEDA; 6) Penyempurnaan Renstra PD hasil verifikasi; dan 7) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Substansi yang tertuang pada Renstra PD adalah sebagai berikut: 1) Tujuan dan sasaran Renstra PD harus selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD 2) Penentuan tujuan/sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan pun harus selaras dengan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Hasil evaluasi capaian kinerja tujuan, sasaran, dan hasil (*outcome*) Renstra PD dari hasil evaluasi

RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2024, Hasil evaluasi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah sampai dengan tahun 2024, isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah, Kebijakan nasional, Regulasi yang berlaku, Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

Guna menjabarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dimana di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah menjabarkan secara rinci tujuan, sasaran serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang berikut strategi dan kebijakan yang akan diambil. Dokumen Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan sehingga program dan kegiatan yang akan disusun diharapkan tidak menyimpang dari perencanaan yang ada dan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata

Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah menginterpretasikan visi misi dan program proritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ke dalam Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, guna menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sampai dengan 2029.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2025 – 2029;

2. Menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan para stakeholder pelayanan;
3. Sebagai pedoman penyelenggaraan Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam dokumen Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 serta;
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi perangkat daerah, Sumber daya perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, Permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis perangkat daerah;

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah serta manajemen risiko strategis perangkat daerah;

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah, dan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan perangkat daerah;

BAB V Penutup

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut;

LAMPIRAN

Berisi pohon kinerja perangkat daerah, cascading perangkat daerah, dan manajemen risiko perangkat daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mendasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya menyejahterakan masyarakat memerlukan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah tersebut dipengaruhi perekonomian global, nasional dan daerah, kinerja keuangan di masa lalu, serta regulasi maupun kebijakan pemerintah. Dengan adanya kebijakan keuangan daerah diharapkan sumber daya ekonomi milik daerah dapat digunakan secara tepat dan setiap rupiah uang daerah digunakan secara efektif dan efisien dalam pembangunan. Kinerja pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 dapat digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020–2024

Uraian	Jumlah (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	**25.393.735.934**	**26.633.000.085**	**24.167.935.634**	**25.369.733.556**	**26.378.719.626**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**13.668.282.278**	**14.695.474.898**	**16.264.618.853**	**17.012.509.421**	**17.650.936.913**
Pajak Daerah	11.139.173.309	11.718.378.320	13.484.851.151	13.976.642.716	14.210.241.533
Retribusi Daerah	98.297.991	91.634.269	115.158.014	139.377.038	2.318.821.514
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	530.091.029	508.263.876	546.717.104	638.482.406	687.813.166
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.900.719.948	2.377.198.431	2.117.892.583	2.258.007.259	434.060.698
PENDAPATAN TRANSFER	**11.702.101.655**	**11.871.796.336**	**7.810.882.578**	**8.278.928.086**	**8.701.438.866**
Dana Bagi Hasil Pajak	843.392.119	768.488.755	626.671.963	601.686.290	570.985.609
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.888.016	267.356.655	302.028.750	331.425.232	325.246.959
Dana Alokasi Umum	3.438.709.973	3.432.978.859	3.435.718.090	3.558.428.755	3.819.010.791

Dana Alokasi Khusus (fisik)	350.564.240	401.885.567	371.734.785	404.100.292	473.940.472
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	6.983.232.690	6.932.375.674	3.013.508.989	3.296.089.570	3.474.257.466
Dana Insentif Daerah	68.212.455	68.710.605	61.352.500	87.197.945	37.997.568
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.102.159	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.352.000**	**65.728.851**	**92.434.201**	**78.296.049**	**26.343.846**
Pendapatan Hibah	23.352.000	64.882.003	92.161.740	77.972.123	25.600.169
Lain-lain pendapatan sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	846.848	272.461	323.925	743.676
Jumlah Pendapatan	**25.393.735.934**	**26.633.000.085**	**24.167.935.634**	**25.369.733.556**	**26.378.719.626**
BELANJA DAERAH	**25.651.740.349**	**25.843.800.193**	**23.950.240.497**	**25.800.341.207**	**27.187.126.497**
BELANJA OPERASI	**16.223.988.285**	**16.826.577.831**	**13.456.887.671**	**14.887.780.012**	**16.083.865.301**
Belanja Pegawai	6.483.761.623	5.685.925.255	5.902.903.886	6.362.326.855	7.023.084.524
Belanja Barang dan Jasa	4.104.637.788	5.345.399.454	5.377.369.153	5.791.112.760	6.234.228.358
Belanja Subsidi	-	90.482	4.958.884	5.350.753	1.399.999
Belanja Hibah	5.593.181.623	5.728.982.384	2.092.761.564	2.610.303.175	2.780.143.423
Belanja Bantuan Sosial	42.407.250	66.180.255	78.894.181	118.686.467	45.008.996
BELANJA MODAL	**996.994.505**	**1.447.620.411**	**1.713.641.630**	**1.794.862.778**	**1.733.084.096**
Belanja Modal Tanah	14.338.900	79.135.275	17.346.322	67.791.905	12.221.207
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	494.933.371	578.353.949	767.027.589	751.571.586	855.982.713
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.773.603	330.679.148	359.726.308	526.682.150	411.044.257
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.713.123	351.328.654	475.441.543	351.052.937	366.478.924
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	113.376.388	108.123.383	94.099.866	97.389.078	86.434.858
Belanja Modal Aset Lainnya	859.119	-	-	375.119	922.135
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.783.884.978**	**72.303.305**	**16.545.479**	**740.000**	**10.225.800**
Belanja Tidak Terduga	1.783.884.978	72.303.305	16.545.479	740.000	10.225.800
BELANJA TRANSFER	**6.646.872.581**	**7.497.298.646**	**8.763.165.716**	**9.116.958.416**	**9.359.951.298**
Belanja Bagi Hasil	4.633.245.749	5.735.553.033	6.085.808.822	6.264.046.226	6.334.544.870
Belanja Bantuan Keuangan	2.013.626.831	1.761.745.612	2.677.356.893	2.852.912.190	3.025.406.428
Jumlah Belanja	**25.651.740.349**	**25.843.800.193**	**23.950.240.497**	**25.800.341.207**	**27.187.126.497**
Defisit	**(258.004.415)**	**789.199.892**	**217.695.136**	**(430.607.651)**	**(808.406.871)**
PEMBIAYAAN	**1.119.409.987**	**646.492.992**	**1.018.773.865**	**1.330.794.071**	**1.385.420.547**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1.119.409.987**	**861.492.992**	**1.909.773.865**	**1.330.794.071**	**1.385.420.547**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.119.409.987	861.376.784	1.435.692.146	1.236.470.622	900.186.419
Pencairan dana Cadangan	-	-	-	94.130.600	505.869.400
Penerimaan pengembalian dana bergulir	-	-	-	-	-
Pembiayaan dari Sektor Perbankan	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	252.540	116.207	474.081.719	192.848	64.727

PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**215.000.000**	**891.000.000**	**-**	**20.700.000**
Pembentukan dana cadangan	-	200.000.000	400.000.000	-	-
Penyertaan modal	-	15.000.000	491.000.000	-	20.700.000
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	-	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan	**1.119.409.987**	**646.492.992**	**1.018.773.865**	**1.330.794.071**	**1.385.420.547**

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Pada tabel 2.1, Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh 2 (dua) komponen besar yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Pendapatan Transfer yang tercermin dari perkembangan komponen pendapatan selama rentang tahun 2020-2024. Pada masa pemulihan pasca pandemi *Covid-19* tersebut, pendapatan daerah sempat tumbuh negatif pada tahun 2022 akibat perubahan kebijakan pendapatan transfer namun demikian secara keseluruhan pendapatan daerah pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.008 triliun atau sebesar 3,98%.

Sedangkan pada realisasi Belanja Daerah masih didominasi oleh belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dengan rata-rata capaian sebesar 60,33%. Selanjutnya, pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, lebih difokuskan pada penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun sebelumnya serta pencadangan untuk kegiatan Pilkada Tahun 2024. Terkait kebijakan penyertaan modal dilaksanakan sebagai bentuk pengembangan usaha serta penyehatan BUMD. Sedangkan kebijakan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah merupakan divestasi atas salah satu kepemilikan BUMD pada tahun 2022 serta pengembalian piutang atas program dana bergulir. Dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah, pembentukan dana cadangan mulai dilakukan tahun 2021 untuk pemenuhan kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Tabel 2.2

Neraca Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Uraian	**Jumlah (Rp. 000)**				
	Tahun 2020	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**
ASET	37.222.304.291	39.291.945.337	40.276.338.752	40.934.354.196	40.261.948.714
ASET LANCAR	3.316.755.368	3.791.840.781	3.561.496.934	3.418.108.280	3.427.967.953
Kas dan Setara Kas	864.937.343	1.436.740.557	1.237.681.108	907.267.200	587.530.474
Piutang Pajak Daerah	2.050.129.305	2.116.395.701	2.212.266.408	2.625.886.012	2.897.664.180
Piutang Retribusi Daerah	977.885	1.188.953	265.512	86.035	111.893.619
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	157.475.313	344.393.176	58.532.786	31.181.471	1.832.728
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	128.148.979	-	14.764.276	4.254	53.079.604
Piutang Lainnya	16.031.691	15.717.526	15.599.471	15.406.623	15.157.041
Penyisihan Piutang	-418.683.863	-642.081.528	-380.010.526	-517.709.600	-560.159.696
Beban Dibayar Dimuka	6.144.929	5.756.838	5.301.065	5.799.321	5.086.493
Persediaan	511.593.784	513.729.554	397.096.831	350.191.210	315.883.508
INVESTASI JANGKA PANJANG	6.424.346.793	7.454.908.269	7.359.256.134	7.761.580.723	7.929.016.426
Investasi Jangka Panjang Permanen	6.424.346.793	7.454.908.269	7.359.256.134	7.761.580.723	7.929.016.426
ASET TETAP	25.972.626.841	26.362.173.533	26.085.962.628	26.589.416.803	26.620.736.197

Tanah	13.483.227.890	13.583.627.731	13.198.047.275	13.069.880.522	12.332.651.846
Peralatan dan Mesin	6.808.241.676	7.529.773.129	8.329.364.755	9.123.265.698	9.528.039.167
Gedung dan Bangunan	7.563.815.353	7.920.921.189	8.861.709.983	9.491.863.080	9.849.541.705
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.192.168.636	10.585.831.733	11.173.745.673	11.586.304.551	12.507.048.034
Aset Tetap Lainnya	1.365.494.887	1.472.453.852	976.375.566	1.053.571.666	1.056.350.270
Konstruksi dalam Pengerjaan	737.058.609	788.310.129	242.550.742	245.302.753	287.616.819
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-14.177.380.211	-15.518.744.231	-16.695.831.367	-17.980.771.469	-18.940.511.645
DANA CADANGAN	-	200.000.000	600.000.000	505.869.400	-
Dana Cadangan	-	200.000.000	600.000.000	505.869.400	-
ASET LAINNYA	1.508.575.287	1.483.022.752	2.669.623.055	2.659.378.989	2.146.938.213
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	96.104.229	74.906.991	107.001.525	100.429.933	96.000
Aset Tak Berwujud	7.656.505	28.936.052	36.540.063	39.808.975	45.259.342
Aset Lain-lain	1.404.814.552	1.756.554.545	2.898.167.680	2.955.683.663	3.160.983.940
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-21.190.441	-25.209.487	-30.065.845	-36.070.409
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-356.184.395	-450.364.793	-504.977.410	-1.023.416.071
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	53.958	85.412
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	-	-	103.488.065	98.445.714	-
PROPERTI INVESTASI	-	-	-	-	137.289.923
Properti Investasi Tanah	-	-	-	-	122.427.169
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	35.568.943
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	-20.706.189
KEWAJIBAN	824.663.799	383.270.068	338.699.949	431.330.988	557.443.147
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	824.663.799	383.270.068	338.699.949	431.330.988	557.443.147
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	249.993	281.977	323.256	204.401	28.310
Pendapatan Dibayar Dimuka	37.083.532	39.251.892	38.988.175	44.550.351	34.750.163
Utang Belanja	199.503.881	339.312.280	287.498.121	380.841.449	507.205.974
Utang Jangka Pendek Lainnya	587.826.391	4.423.919	11.890.395	5.734.786	15.458.698
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
EKUITAS	36.397.640.492	38.908.675.268	39.937.638.803	40.503.023.207	39.704.505.567
Ekuitas	36.397.640.492	38.908.675.268	39.937.638.803	40.503.023.207	39.704.505.567
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	37.222.304.291	39.291.945.337	40.276.338.752	40.934.354.196	40.261.948.714

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah pada suatu periode tertentu. Laporan neraca akan memberikan informasi penting kepada *stakeholder* internal maupun eksternal (manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya), didalamnya adalah jenis akun riil dimana hasil operasional pada periode tersebut akan berpengaruh terhadap nilai neraca seperti besarnya aset, kewajiban yang harus dibayar dan ekuitas yang dimiliki.

Mengacu pada tabel 2.2 Neraca Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024, pada aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dijabarkan

kembali sesuai dengan pencatatan aset pada pengelola dan aset pada pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah, yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BPKAD selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) melaksanakan fungsi sebagai pejabat penatausahaan barang yang bertugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah. Adapun secara terinci dijabarkan sebagai berikut:

a. meneliti dan menyetujui RKBMD;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sedangkan tugas Pejabat Penatausahaan Barang pada BPKAD selaku pengguna barang adalah sebagai berikut:

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang;
b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah memerlukan persetujuan Gubernur;
d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan Barang Milik Daerah;
e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
f. membantu pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi Barang Milik Daerah;
g. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
h. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah; membantu pengelola barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah;

i. menyusun laporan Barang Milik Daerah

Adapun pembagian klasifikasi pencatatan aset dimaksud sebagaimana tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3
Klasifikasi Pencatatan Aset Tetap Berdasarkan Jenis
Pada Pengelola Barang
Tahun 2020 sampai dengan 2024

Kode Jenis	Keterangan Jenis	TA 2020		TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024		TA 2025 (sd Sep 2025)	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1.3.1	TANAH	8	10.821.023.800	21	24.752.947.789	17	20.731.042.285	21	57.446.551.785	19	57.026.370.785	18	56.520.120.785
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	1.717	20.695.433.747	1.732	22.100.520.519	1.711	18.486.537.403	1.707	17.917.394.172	1.296	11.915.075.824	1.296	12.069.685.890
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	81	187.095.994.818	52	179.986.449.618	38	169.526.867.330	42	186.053.098.230	38	185.018.754.130	37	184.941.454.130
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2	27.080.498.090	2	27.080.498.090	2	27.080.498.090	2	27.080.498.090	2	27.080.498.090	2	27.080.498.090
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.808	245.692.950.455	1.807	253.920.416.016	1.768	235.824.945.108	1.772	288.497.542.277	1.355	281.040.698.829	1.353	280.611.758.895

Sumber : SIM ASET (2025)

Tabel 2.4
Klasifikasi Pencatatan Aset Tetap Berdasarkan Jenis
Pada Pengguna Barang
Tahun 2020 sampai dengan 2024

Kode Jenis	Keterangan Jenis	TA 2020		TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024		TA 2025 (sd Sep 2025)	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1.3.1	TANAH	10.143	13.472.406.866.559	10.475	13.558.874.783.755	10.128	13.177.316.232.743	9.877	13.012.433.970.467	8.721	12.275.625.475.215	8.764	13.232.243.290.682
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	935.739	6.787.546.242.767	1.009.121	7.507.672.609.146	1.070.582	8.310.878.218.082	1.129.619	9.105.348.303.954	1.249.074	9.516.124.091.433	1.267.801	9.641.188.074.326
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	19.682	7.376.719.358.254	19.753	7.740.934.739.582	20.185	8.692.183.115.832	20.534	9.305.809.982.374	20.784	9.664.522.951.765	20.827	9.880.062.383.270
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	15.260	10.165.088.138.546	15.541	10.558.751.235.128	15.698	11.146.665.175.102	15.099	11.559.224.053.455	14.860	12.479.967.536.320	14.874	12.699.330.000.136
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	22.020.930	1.365.494.887.464	50.689.063	1.472.453.852.706	90.521.887	976.375.566.548	120.052.554	1.053.571.666.936	141.313.771	1.056.350.270.097	144.298.641	1.090.744.956.845
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	310	737.058.609.225	297	788.310.129.085	294	242.550.742.201	292	245.302.753.445	274	287.616.819.183	273	89.371.656.542
	JUMLAH	23.002.064	39.904.314.102.815	51.744.250	41.626.997.349.402	91.638.774	42.545.969.050.508	121.227.975	44.281.690.730.631	142.607.484	45.280.207.144.013	145.611.180	46.632.940.361.801

Sumber : SIM ASET (2025)

Mengacu ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan kas daerah, dan bidang aset daerah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan kas daerah, dan bidang aset daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan kas daerah, dan bidang aset daerah;
4. pembinaan teknis di bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan kas daerah, dan bidang aset daerah;
5. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi BPKAD terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri:
   a. Subbagian Program;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Anggaran, terdiri:
4. Bidang Akuntansi, terdiri:
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri:
6. Bidang Aset Daerah, terdiri:
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Asrama Donohudan Kelas B;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

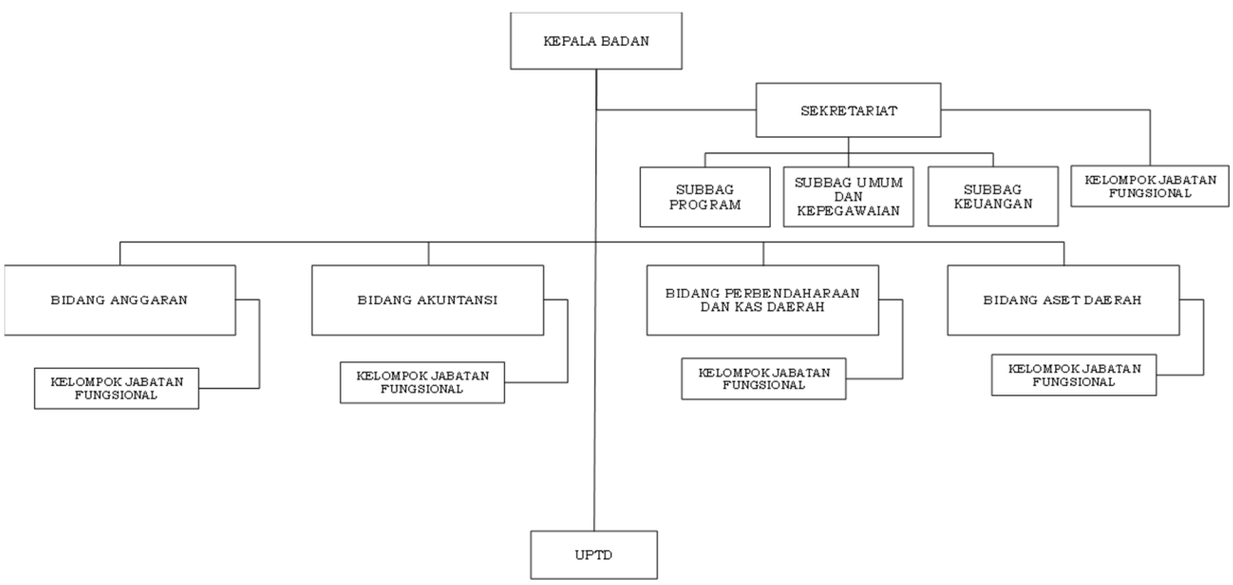

Gambar 2.1. Bagan Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan dibantu oleh unsur Sekretariat dan Unsur Bidang serta Unit. Adapun tugas dari masing-masing unsur sebagai berikut:

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi:

1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
2) pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
3) pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
5) pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
7) penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

b) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran melaksanakan fungsi:

1) perumusan kebijakan terkait anggaran, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
2) pelaksanaan kebijakan terkait anggaran, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait anggaran, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4) monitoring dan evaluasi terkait anggaran, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi

rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

5) pelaporan dan rekomendasi terkait anggaran, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Ketua Kelompok Kerja, yang meliputi:

1) Pokja Perencanaan Anggaran;
2) Pokja Penyusunan Anggaran; dan
3) Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota.

c) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi melaksanakan fungsi:

1) perumusan kebijakan terkait akuntansi, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
2) pelaksanaan kebijakan terkait akuntansi, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait akuntansi, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4) monitoring dan evaluasi terkait akuntansi, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
5) pelaporan dan rekomendasi terkait akuntansi, pengelolaan data dan informasi statistik keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta evaluasi rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Ketua Kelompok Kerja, yang meliputi:

1) Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2) Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD; dan
3) Pokja Evaluasi dan Informasi Data Keuangan Daerah.

d) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan dan kas daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah melaksanakan fungsi:

1) perumusan kebijakan terkait perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
2) pelaksanaan kebijakan terkait perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait dan pengelolaan kas daerah;
4) monitoring dan evaluasi terkait perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
5) pelaporan dan rekomendasi terkait perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah; dan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan dan Kasda dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Ketua Kelompok Kerja, yang meliputi:

1) Pokja Penatausahaan Keuangan;
2) Pokja Pengelolaan Kas Daerah; dan
3) Pokja Verifikasi Dokumen Keuangan.

e) Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset Daerah melaksanakan fungsi:

1) perumusan kebijakan terkait perencanaan aset daerah, penatausahaan barang daerah dan status penggunaan aset daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset daerah;
2) pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan aset daerah, penatausahaan barang daerah dan status penggunaan aset daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset daerah;
3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan aset daerah, penatausahaan barang daerah dan status penggunaan aset daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset daerah;
4) monitoring dan evaluasi terkait perencanaan aset daerah, penatausahaan barang daerah dan status penggunaan aset daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset daerah; dan
5) pelaporan dan rekomendasi terkait perencanaan aset daerah, penatausahaan barang daerah dan status penggunaan aset daerah, perubahan status hukum dan pengamanan aset daerah; dan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh 3 (tiga) Ketua Kelompok Kerja, yang meliputi:

1) Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
2) Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah; dan

3) Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah.

f) UPTD Pengelola Asrama Donohudan Kelas B

UPTD Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B, bertugas melakukan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan di Bidang Pengelolaan Asrama Donohudan. Tugas dimaksud, meliputi:

1) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran pengelolaan Asrama Donohudan;
2) menyusunan rencana teknis operasional di bidang Pemeliharaan, Promosi, Pelayanan, Sarana dan Prasarana Asrama Donohudan;
3) mengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Promosi, Pelayanan, Sarana dan Prasarana Asrama Donohudan;
4) melaksanakan pemberdayaan dan optimalisasi aset asrama Donohudan melalui promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
5) melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggaraan haji;
6) melaksanakan pengelolaan sarana prasarana asrama Donohudan;
7) melaksanakan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan asrama Donohudan
8) menyusun evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi, Pelayanan, Sarana dan Prasarana Asrama Donohudan; dan
9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B, terdiri atas:

1) Kepala UPTD;
2) Subbagian Tata Usaha; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

BPKAD Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sumber daya yang cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan sumber daya secara garis besar terdiri dari sumber daya aparatur yang terkait kepegawaian dan sumber daya terkait sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang operasional di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jumlah Pegawai di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 159 pegawai, 126 orang ASN dan 33 orang Non ASN, dengan komposisi jumlah pegawai berdasarkan golongan, jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam Tabel 2.5 dan 2.6 berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Per Bulan Agustus 2025

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan I	1	2	3
2	Golongan II	4	2	6
3	Golongan III	47	34	81
4	Golongan IV	13	10	23
5	PPPK	8	5	13
Jumlah		**73**	**53**	**126**

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di BPKAD
Per Bulan Agustus 2025

No.	Tingkat Pendidikan	ASN			Non ASN			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	SD	1	2	3	-	-	-	3
2	SMP Sederajat	2	-	2	1	-	1	3
3	SMA Sederajat	13	-	13	13	2	15	28
4	D1	-	-	-	-	-	-	-
5	D2	-	-	-	-	-	-	-
6	D3	3	3	6	3	1	4	10
7	D4	6	4	10	-	-	-	10
8	S1	28	24	52	7	5	12	64
9	S2	20	20	40	-	1	1	41
10	S3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**73**	**53**	**126**	**24**	**9**	**33**	**159**

Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah per Agustus 2025

KODE OBJEK	NAMA BARANG	PER AGUSTUS 2025	
		JML	HARGA
1.3.1	**Tanah**	**7**	**55,767,500,000.00**
1.3.1.01	Tanah	7	55,767,500,000.00
1.3.2	**Peralatan Dan Mesin**	**8,108**	**53,248,761,234.00**
1.3.2.01	Alat Besar	44	2,568,329,860.00
1.3.2.02	Alat Angkutan	118	12,027,022,138.00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7,119	26,563,332,845.00
1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	192	3,341,770,374.00
1.3.2.10	Alat Komputer	575	8,628,306,017.00
1.3.2.18	Rambu-rambu	60	120,000,000.00
1.3.3	**Gedung Dan Bangunan**	**62**	**82,701,154,912.00**
1.3.3.01	Bangunan Gedung	35	79,472,351,743.00
1.3.3.02	Monumen	1	846,935,000.00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	26	2,381,868,169.00
1.3.4	**Jalan, Jaringan Dan Irigasi**	**7**	**1,434,138,094.00**
1.3.4.02	Bangunan Air	1	597,128,465.00
1.3.4.03	Instalasi	5	382,553,273.00
1.3.4.04	Jaringan	1	454,456,356.00
1.3.5	**Aset Tetap Lainnya**	**44**	**9,178,000.00**
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	42	9,078,000.00
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	2	100,000.00
TOTAL		**8,228**	**193,160,732,240**

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan BPKAD pada tahun 2020-2024 yang didasarkan pada sasaran/target Renstra BPKAD dituangkan dalam tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024. Selama periode tahun

2020-2024 terdapat beberapa perubahan indikator kinerja dari dokumen Renstra BPKAD 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Perubahan indikator kinerja tersebut terdapat pada indikator kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sedangkan untuk indikator kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah pada pengelolaan keuangan dan barang milik daerah tidak terdapat perubahan.

Indikator kinerja lama tujuan perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” pada Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 berubah menjadi “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” pada RPD BPKAD Tahun 2024-2026. Sedangkan pada indikator kinerja sasaran perangkat daerah unsur penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” pada Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 berubah menjadi “Indeks Manajemen Risiko” pada RPD BPKAD Tahun 2024-2026.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 2.8 pada tahun 2024 hampir semua indikator kinerja tercapai 100% kecuali untuk indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Indikator Kinerja Tujuan. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dilakukan melalui pendampingan, pembinaan, koordinasi dan sosialisasi kepada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan *stakeholders* di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada indikator kinerja sasaran masih belum tercapai 100% atau hanya tercapai 96,41% namun demikian BPKAD optimis pada akhir tahun Renstra 2025-2030 akan tercapai 100% karena BPKAD telah mengusahakan perbaikan pada sisi perencanaan dan evaluasi kinerja BPKAD.

Indikator kinerja Persentase Evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan pada indikator kinerja program perangkat daerah yang pada tahun 2022 tercapai 99,05% meskipun pada tahun-tahun sebelumnya, dan di Tahun 2024 telah tercapai 100%. Hal tersebut dikarenakan adanya keterlambatan pada salah satu tahapan penyusunan APBD pada Kabupaten Tegal di Tahun 2023 dan Kabupaten Demak di Tahun 2024 sehingga tidak dilakukan evaluasi pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten yang bersangkutan. Namun demikian, BPKAD Provinsi Jawa Tengah juga optimis pada pelaksanaan tahun Renstra 2025-2029, indikator kinerja tersebut akan tercapai 100%. Hal ini diintervensi melalui asistensi dan monitoring terhadap tahapan penyusunan APBD Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi keterlambatan penyusunan APBD Kabupaten/Kota.

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024 PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	Tujuan PD																			
	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah	%	n.a.	n.a.	n.a.	65	67,50	70	72,50	-	70,23	72,84	77,20	68	-	108,05	107,91	110,29	93,79	-
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	n.a.	n.a.	n.a.	80	80	80	80	-	81	82,93	81,25	82,25	-	101,25	103,66	101,56	102,81	-
2	Sasaran PD																			
	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	65	67,50	70	72,50	-	70,23	72,84	77,20	68	-	108,05	107,91	110,29	93,79	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024 PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Nilai Kepuasan Masyarakat	angka	n.a.	n.a.	n.a.	80	80	80	80	-	81	82,93	81,25	82,25		101,25	103,66	101,56	102,81	-
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	n.a.	n.a.	n.a.	77	80	80	80	-	72,16	76,68	79,41	77,65	-	93,71	95,85	99,26	97,06	-
3	Program PD																			
	Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	99,05	99,05	-	100	100	99,05	99,05	-
	Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a	n.a	100	100	-	n.a	n.a	100	100	-	n.a	n.a	100	100	-
	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase realisasi serapan APBD	%	n.a.	n.a.	n.a.	92	92	92	95	-	93,70	94,28	98,65	93,85	-	101,85	102,48	107,23	98,79	-
	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	n.a.	n.a.	n.a.	65	67,50	70	72,50	-	70,23	72,84	77,20	68	-	108,05	107,91	110,29	93,79	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024 PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
B	**Renstra PD Tahun 2024-2026**																			
1	Tujuan PD																			
	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	97,75	-	-	-	-	97,97	-	-	-	-	100,23
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	84,02	-	-	-	-	84,02	-	-	-	-	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024 PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	angka	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	76	-	-	-	-	73,27	-	-	-	-	96,41
2	Sasaran PD																			
	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	93,25	-	-	-	-	93,25	-	-	-	-	100
	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Nilai Kepuasan Masyarakat	angka	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	81	-	-	-	-	82,50	-	-	-	-	101,85
	Indeks Manajemen Risiko	angka	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	2,50	-	-	-	-	2,86	-	-	-	-	110
3	Program PD																			
	Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024 PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	tersusun tepat waktu																			
	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	84,02	-	-	-	-	84,02	-	-	-	-	100
	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024 PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu																			
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan	n.a.	172.112.520	8.641.595.508	9.040.602.293	8.403.072.922	101.715.578	172.112.520	8.661.336.514	9.040.203.549	9.453.165.465	122.433.107,88	88.737.499,44	8.538.291.783	9.111.132.508	9.491.525.186	120,37	51,56	98,58	100,78	100,41	9.193,72	7.652,42
2	Belanja	23.920.701	62.863.066	8.990.319.401	8.778.666.193	10.303.524.793	57.392.180	43.341.801	8.948.185.240	9.907.124.939	10.306.465.680	51.984.416,54	41.288.392,12	8.827.333.683	9.186.000.151	9.436.340.517	90,58	95,26	98,65	92,72	91,56	17.857,96	18.052,25
3	Pembiayaan	n.a.	350.000.000	286.128.777	572.200.000	1.378.000.000	-	-	1.018.692.885	572.200.000	1.336.055.820	-	-	1.018.692.884	1.330.599.603	485.169.400	-	-	100,00	232,54	36,31	31,15	-52,37

Catatan: perhitungan rata-rata pertumbuhan pembiayaan menggunakan anggaran dan realisasi dari tahun 2022-2024 karena tidak ada alokasi anggaran pada tahun 2020-2021

Pada tabel 2.9, bahwa terdapat kenaikan cukup besar pada komponen Pendapatan dan Belanja karena sejak tahun 2022 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dialokasikan pada anggaran BPKAD. Pengalokasian tersebut merupakan alokasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah dan Desa, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dan Pegelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKAD disajikan pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Dinamika regulasi terkait pelayanan perangkat daerah
			Kualitas SDM pelayanan yang kurang memadai
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja dalam perencanaan dan evaluasi kinerja
			Dinamika regulasi terkait pengelolaan keuangan perangkat daerah
			Kualitas SDM pengelola keuangan yang kurang memadai
		Dinamika proses penyusunan APBD	Penyusunan APBD memerlukan kematangan perencanaan, sehingga kesalahan dalam menginput dokumen perencanaan akan berdampak pada proses penyusunan APBD
			Penyusunan APBD dipengaruhi berbagai aspek kebijakan baik pusat maupun daerah seperti kebijakan alokasi, *tools* penganggaran dan dinamika politik yang berkembang
			SDM yang mempengaruhi waktu penyusunan APBD
		Masih terdapat koreksi dalam proses penyusunan LKPD	Beragamnya persepsi terkait pelaksanaan dan kebijakan pelaporan APBD
			Dinamika regulasi dan penggunaan *Tools* penganggaran dan pelaporan APBD (SIPD)
		Regulasi pembayaran transaksi non tunai (TNT) dan manajemen kas Pemerintah Daerah	Dinamika regulasi dan penggunaan *Tools* penatausahaan APBD (SIPD)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD belum optimal
		Pemahaman pengelolaan BMD pada perangkat daerah yang kurang memadai	Perencanaan dan pemanfaatan BMD belum mendasar pada ketersediaan dan kebutuhan BMD
			Laporan BMD tidak tepat waktu dan kurang valid karena belum optimalnya pengurus dan pengguna barang
			Pengamanan BMD secara *Yuridis* masih terkendala karena tidak lengkapnya dokumen kepemilikan

2.5. Penentuan Isu-isu Strategis

2.5.1. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Telaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah “JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045” yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Penerjemahan visi dan misi daerah tersebut menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, dimana tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah "JAWA TENGAH YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN" dan akan diwujudkan melalui 3 (tiga) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis;
2. Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan;

3. Terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.

Mendasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di atas, maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi pembangunan ke tiga yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas” dan sasaran ke satu yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis”.

Berdasarkan pada telaahan di atas, maka didapatkan isu-isu strategis pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Pengamanan yuridis atas barang milik daerah (BMD) yang belum optimal
2. Semakin sempitnya ruang fiskal Pemerintah Provinsi dikarenakan kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah.
3. tingginya ketergantungan pemerintah provinsi terhadap transfer pemerintah pusat.

Tabel 2.11
Perumusan Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	**Permasalahan Perangkat Daerah**	**Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah**	**Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah**			**Isu Strategis Perangkat Daerah**
			Global	**Nasional**	**Regional**	
1	2	3	4	5	6	7
1.Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah	1.Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	1.**Isu tata kelola pemerintahan:** pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas 2.**Isu kesinam-bungan pemba-ngunan:** konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	1. Pengamanan yuridis atas barang milik daerah (BMD) yang belum optimal 2. Semakin sempitnya ruang fiskal Pemerintah Provinsi dikarenakan kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. 3. tingginya ketergantungan pemerintah provinsi terhadap transfer pemerintah pusat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Provinsi Jawa Tengah

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan yang akan dicapai oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatkan tata kelola pengelolaan aset daerah; dan
3. Meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat daerah berintegritas dan dinamis.

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran yang akan dicapai oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan;
2. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah; dan
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah beserta indikatornya yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	-	97,75	97,8	97,85	97,9	97,95	98	98,05	98,05
		Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Laporan Pertanggungjawaban yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Realisasi APBD	%	93	93,2	94	94,2	94,4	94,6	94,8	95	95

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Meningkatkan tata kelola pengelolaan aset daerah		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	%	-	3,24	3,08	3,12	3,16	3,2	3,24	3,28	3,28
		Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	-	76	76	76	76	76	76	76	76
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	81	81	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	-	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9	2,9

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui:

1. Melakukan penguatan proses perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan, penyajian dan analisis pelaporan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Evaluasi dan pembinaan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota guna menjamin tata kelola keuangan serta sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Melakukan penguatan kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) serta menjalankan mitigasi atas pengelolaan BMD melalui penguatan perencanaan dan penatausahaan BMD;
4. Meningkatkan kapasitas pegawai serta penguatan skala prioritas kebutuhan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan akuntabilitas kinerja; dan
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi dalam rangka mendukung pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam rangka membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional, maka dirumuskan arah kebijakan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dituangkan dalam tabel 3.2. sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan	Melakukan penguatan kebijakan pengamanan BMD secara berkesinambungan	1. Optimalisasi SIM ASET (perencanaan, penatausahaan, pemberdayaan, penghapusan dan pemindahtanganan BMD). 2. Koordinasi dengan Bappeda dalam rangka pendanaan pengamanan di masing-masing OPD.
		Menjalankan mitigasi atas pengelolaan BMD dengan melakukan penguatan perencanaan dan	1. Penguatan kapasitas pengelolaan Barang Milik Daerah baik pada aset pengelola maupun pengguna.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		penatausahaan BMD sebagai tindak lanjut inventarisasi/sensus BMD	2. Melakukan penguatan tata kelola perencanaan BMD, yang terintegrasi dengan menekankan perencanaan kebutuhan BMD yang berbasis kebutuhan riil dan mengacu pada hasil inventarisasi. 3. Peningkatan akurasi dan kualitas penatausahaan BMD melalui verifikasi dan validasi atas hasil pengadaan, perolehan lain yang sah dan hasil inventarisasi BMD secara akurat. 4. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan atas pengelolaan BMD dengan mengintegrasikan indikator pengelolaan aset dalam rencana strategis.
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Melakukan penguatan proses perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1. Melakukan optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. 2. Melakukan pembinaan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD dan Kabupaten/Kota.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Melakukan Pemantauan dan Pengendalian terhadap keselarasan APBD Kabupaten/Kota secara tersistem. 4. Meningkatkan kualitas Belanja Daerah baik tingkat SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Meningkatkan fungsi koordinasi pengelolaan keuangan daerah secara vertikal dan horisontal.
		Penyajian dan analisis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah serta penyampaian informasi data keuangan daerah melalui penguatan sistem keuangan daerah yang terintegrasi secara tranparan dan akuntabel.	1. Optimalisasi implementasi dan integrasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Penguatan penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah melalui sinergitas mulai tahap perencanaan sampai pengawasan. 3. Melakukan pembinaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada SKPD dan Kabupaten/Kota. 4. Meningkatkan fungsi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Pemerintah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pusat dan Kabupaten/Kota.
		Menjaga dan menciptakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien melalui penyusunan kebijakan-kebijakan keuangan daerah	Penyusunan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
		Pembinaan dan evaluasi pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Melakukan pembinaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada SKPD dan Kabupaten/Kota. 2. Meningkatkan fungsi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Melakukan penguatan perbendaharaan dan kas daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah.	1. Menguatkan tata kelola perbendaharaan dan kas daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel melalui keselarasan dokumen anggaran dengan realisasi APBD, pemanfaatan teknologi digital dalam penatausahaan keuangan, pemantauan berkelanjutan terhadap penatausahaan OPD, optimalisasi manajemen kas agar dana tersedia tepat waktu, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain.
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Peningkatan perencanaan dan evaluasi dalam rangka mendukung kualitas pelayanan Perangkat Daerah	1. Optimalisasi manajemen risiko dalam rangka mendukung perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah. 2. Menguatkan kapasitas SDM dalam rangka perencanaan dan evaluasi layanan Perangkat Daerah.
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat komputerisasi dan diklat persandian	1. Memberikan kesempatan dan kemudahan bagi pegawai yang akan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			mengikuti diklat dimaksud. 2. Memberdayakan kemampuan pegawai sesuai dengan diklat yang telah diikuti.
		Membuat skala prioritas kebutuhan administrasi perkantoran	Memberikan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran sesuai kebutuhan.
		Meningkatkan pelayanan, akuntabilitas dan percepatan infomasi Belanja dan Pembiayaan Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	1. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE untuk mewujudkan tata kelola keuangan SKPKD yang bersih, transparan, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. 2. Penguatan kapasitas SDM dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi penunjang terkait keuangan SKPKD.

Tahapan prioritas pembangunan tahunan BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan diatas, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Pentahapan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Konsolidasi data hasil inventarisasi	Penguatan pengunaan dan pemanfaatan	Penguatan dan penerapan pengamanan	Integrasi data BMD dari SIM Aset dengan	Evaluasi capaian pengelolaan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
BMD guna penyusunan perencanaan dan pengamanan BMD yang efektif	aplikasi SIM aset dalam pengeloaan BMD secara luas	BMD secara aktif dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait	sistem perencanaan program dan kegiatan	BMD dan reformulasi arah pengelolaan BMD
Menyelaraskan dokumen anggaran, serta melakukan penguatan kebijakan penatausahaan dan realisasi APBD, serta pembinaan pelaporan pertanggungja-waban keuangan daerah kepada SKPD dan Kabupaten/Kota	Meningkatkan fungsi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/ Kota serta pembinaan terhadap perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD dan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta melakukan optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Optimalisasi implementasi dan integrasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas belanja daerah baik tingkat SKPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Implementasi Transformasi digital penatausahaan keuangan daerah dengan penguatan penyajian Laporan Pertanggungja-waban Keuangan Pemerintah Daerah melalui sinergitas seluruh tahapan mulai perencanaan sampai pengawasan

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah berupaya melaksanakan amanat dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah melakukan identifikasi risiko serta merumuskan rencana pengendalian risiko, melaksanakan rencana pegendalian risiko. Untuk rencana tindak pengendalian pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ SasaranPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	Keterlambatan atau kekurangan dana yang disalurkan untuk kegiatan OPD	5	Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak akurat dalam proyeksi biaya	Kegiatan OPD terhambat, keterlambatan dalam pencairan dana, dan ketidakmampuan mencapai target program		Kepala BPKAD	
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Efisiensi anggaran	5	Perubahan regulasi pusat terkait penganggaran APBN dan APBD	Penurunan Kualitas Layanan Publik		Kepala BPKAD	
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase Realisasi APBD	SP2D ditandatangani terlambat	5	Keterlambatan dalam verifikasi anggaran dan administrasi dari OPD	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, terhambatnya program-program yang bergantung pada dana tersebut		Bidang Perbendaharaan dan Kasda	

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ SasaranPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Selesai
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	Laporan tidak tersedia sesuai tenggat waktu atau tidak lengkap	5	Keterlambatan dalam pengumpulan data atau revisi data	Potensi masalah dalam evaluasi pertanggungjawaban APBD dan keterlambatan penyaluran dana transfer		Bidang Akuntansi	
Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Indek Pengelolaan Aset (IPA)	Aset dikuasai atau dimanfaatkan pihak luar tanpa izin	5	Kurangnya pengawasan fisik dan pengamanan yuridis atas BMD	Kehilangan atau kerusakan BMD, penyalahgunaan aset		Kepala BPKAD	
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan BMD tidak terintegrasi dengan data keuangan lainnya	5	Tidak terintegrasinya sistem keuangan dan sistem BMD	Laporan yang tidak akurat, masalah sinkronisasi data		Bidang Aset Daerah	
Tujuan: Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Gaji pegawai kurang	5	Kesalahan perhitungan gaji pegawai	Penundaan pembayaran gaji dan/atau revisi anggaran		Sekretariat	

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ SasaranPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Selesai
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terdapat salah input anggaran dalam sistem	5	Ketidakcermatan pegawai	Penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan		Sekretariat	
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pencairan SPJ kegiatan tidak dapat dilaksanakan	5	Sistem keuangan error	Terganggunya pengelolaan anggaran		Sekretariat	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan strategis Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain:

1. Memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
2. Mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
3. Mengupayakan Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra ini dapat tercapai;

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan melalui penyusunan kebijakan penganggaran yang merujuk pada visi misi, program prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang tercantum pada RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Meningkatkan persentase realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah melalui penguatan manajemen kas dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah secara akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui supervisi/pendampingan kepada perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
4. Meningkatkan persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan melalui

supervisi/pendampingan penyusunan RKBMD/RKPMD, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan dan penyusunan neraca BMD pada perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

5. Meningkatkan nilai indeks manajemen risiko perangkat daerah melalui penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah; dan
6. Peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah melalui *survey* kepuasan masyarakat atas layanan perangkat daerah kepada *stakeholder* terkait.

Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah ini tentu saja masih dirasakan perlu adanya peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas Program dan Kegiatan agar dalam Implementasinya dapat diterapkan pada Tugas Pokok dan Fungsi sumber daya manusia (SDM) Aparatur yang ada dengan dukungan dana yang memadai, disertai komitmen seluruh elemen pendukung organisasi untuk Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi yang tercantum pada RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Subbab ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada BPKAD. Penentuan program dan kegiatan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan diuraikan dan dijelaskan secara naratif, untuk kemudian dituangkan dalam tabel 4.1.

Selain penjabaran dan penjelasan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, dalam subbab ini juga dijelaskan sub kegiatan yang mendukung program-program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD. Uraian sub kegiatan yang dilaksanakan BPKAD dalam rangka mendukung program prioritas daerah kemudian dituangkan dalam tabel 4.1.

Adapun rencana program, kegiatan, dan pendanaan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah *												48.702.967.000		53.098.371.000		57.548.292.000		61.083.515.000		66.282.379.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah *	Angka	76	76	76		76		76		76		76		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah **											993.405.000		1.043.073.000		1.188.203.000		1.313.614.000		1.380.294.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah **	Angka	2.6	2.65	2.7	993.405.000	2.75	1.043.073.000	2.8	1.188.203.000	2.85	1.313.614.000	2.9	1.380.294.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								993.405.000		1.043.073.000		1.188.203.000		1.313.614.000		1.380.294.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ***	%	100	100	100	993.405.000	100	1.043.073.000	100	1.188.203.000	100	1.313.614.000	100	1.380.294.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****							993.405.000		1.043.073.000		1.188.203.000		1.313.614.000		1.380.294.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	100	993.405.000	100	1.043.073.000	100	1.188.203.000	100	1.313.614.000	100	1.380.294.250	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****						469.115.000		492.570.000		570.500.000		631.525.000		663.101.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	8	9	8	469.115.000	8	492.570.000	8	570.500.000	8	631.525.000	9	663.101.250	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****						263.334.000		276.500.000		330.000.000		380.000.000		400.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	1	1	1	263.334.000	1	276.500.000	1	330.000.000	1	380.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****						130.478.000		137.002.000		143.852.000		151.045.000		158.597.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	1	130.478.000	1	137.002.000	1	143.852.000	1	151.045.000	1	158.597.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							130.478.000		137.001.000		143.851.000		151.044.000		158.596.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	130.478.000	1	137.001.000	1	143.851.000	1	151.044.000	1	158.596.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah **											47.709.562.000		52.055.298.000		56.360.089.000		59.769.901.000		64.902.085.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah **	Angka	81	81	81.5	47.709.562.000	82	52.055.298.000	82.5	56.360.089.000	83	59.769.901.000	83.5	64.902.085.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									41.607.160.000		44.893.582.000		48.371.323.000		51.381.696.000		55.830.910.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ***	%	100	100	100	41.607.160.000	100	44.893.582.000	100	48.371.323.000	100	51.381.696.000	100	55.830.910.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								32.080.973.000		33.808.088.000		35.467.074.000		37.338.541.000		39.175.597.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	1	1	1	32.080.973.000	1	33.808.088.000	1	35.467.074.000	1	37.338.541.000	1	39.175.597.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							30.029.946.000		31.586.227.000		33.134.120.000		34.822.770.000		36.534.038.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	150	150	150	30.029.946.000	150	31.586.227.000	150	33.134.120.000	150	34.822.770.000	150	36.534.038.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							1.744.492.000		1.900.000.000		1.995.000.000		2.094.750.000		2.199.487.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	1	1	1	1.744.492.000	1	1.900.000.000	1	1.995.000.000	1	2.094.750.000	1	2.199.487.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****							158.800.000		166.740.000		175.077.000		250.000.000		262.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	1	1	1	158.800.000	1	166.740.000	1	175.077.000	1	250.000.000	1	262.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							147.735.000		155.121.000		162.877.000		171.021.000		179.572.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	4	4	4	147.735.000	4	155.121.000	4	162.877.000	4	171.021.000	4	179.572.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	N/A	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	1	243.101.250	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	1	243.101.250	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								105.000.000		110.250.000		115.762.000		121.550.000		127.628.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.000	100	121.550.000	100	127.628.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	127	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							105.000.000		110.250.000		115.762.000		121.550.000		127.628.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	10	5	5	105.000.000	5	110.250.000	5	115.762.000	5	121.550.000	5	127.628.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								2.495.042.000		2.619.793.000		2.914.826.000		3.120.566.000		3.276.595.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	2.495.042.000	100	2.619.793.000	100	2.914.826.000	100	3.120.566.000	100	3.276.595.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.000		255.256.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	4	210.000.000	4	220.500.000	4	231.525.000	4	243.101.000	4	255.256.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							603.250.000		633.412.000		665.083.000		698.337.000		733.254.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	20	20	603.250.000	20	633.412.000	20	665.083.000	20	698.337.000	20	733.254.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						262.500.000		275.625.000		350.000.000		367.500.000		385.875.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	25	25	262.500.000	25	275.625.000	25	350.000.000	25	367.500.000	25	385.875.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						262.500.000		275.625.000		289.406.000		303.876.000		319.070.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	10	10	262.500.000	10	275.625.000	10	289.406.000	10	303.876.000	10	319.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						315.000.000		330.750.000		347.287.000		364.651.000		382.884.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	315.000.000	1	330.750.000	1	347.287.000	1	364.651.000	1	382.884.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						631.792.000		663.381.000		800.000.000		900.000.000		945.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	631.792.000	1	663.381.000	1	800.000.000	1	900.000.000	1	945.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****						210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.000		255.256.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	1	1	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	1	243.101.000	1	255.256.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								262.750.000		275.887.000		644.100.000		730.000.000		766.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	10	15	262.750.000	30	275.887.000	30	644.100.000	30	730.000.000	30	766.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							40.000.000		42.000.000		44.100.000		100.000.000		105.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	10	10	40.000.000	10	42.000.000	10	44.100.000	10	100.000.000	10	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							222.750.000		233.887.000		600.000.000		630.000.000		661.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	10	10	222.750.000	10	233.887.000	10	600.000.000	10	630.000.000	10	661.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								4.713.395.000		5.549.064.000		6.244.061.000		6.606.264.000		6.936.576.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1	1	1	4.713.395.000	1	5.549.064.000	1	6.244.061.000	1	6.606.264.000	1	6.936.576.750	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							10.500.000		11.025.000		11.576.000		12.155.000		12.762.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.000	1	12.155.000	1	12.762.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							682.500.000		716.625.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.155.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	682.500.000	1	716.625.000	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.000		255.256.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	1	243.101.000	1	255.256.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						3.810.395.000		4.600.914.000		5.000.960.000		5.251.008.000		5.513.558.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	3.810.395.000	1	4.600.914.000	1	5.000.960.000	1	5.251.008.000	1	5.513.558.750	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							1.750.000.000		2.320.500.000		2.765.000.000		3.233.250.000		5.304.912.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	50	50	50	1.750.000.000	50	2.320.500.000	50	2.765.000.000	50	3.233.250.000	50	5.304.912.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						1.160.000.000		1.300.000.000		1.365.000.000		1.433.250.000		3.104.912.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	40	40	1.160.000.000	40	1.300.000.000	40	1.365.000.000	40	1.433.250.000	40	3.104.912.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
					Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						210.000.000		220.500.000		400.000.000		600.000.000		800.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	20	20	210.000.000	20	220.500.000	20	400.000.000	20	600.000.000	20	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						380.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	8	8	380.000.000	8	800.000.000	8	1.000.000.000	8	1.200.000.000	8	1.400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								6.102.402.000		7.161.716.000		7.988.766.000		8.388.205.000		9.071.175.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	

						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan ***	%	81	81	81.5	6.102.402.000	82	7.161.716.000	82.5	7.988.766.000	83	8.388.205.000	83.5	9.071.175.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								561.225.000		589.286.000		618.749.000		649.687.000		682.170.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	80	81	81.5	561.225.000	82	589.286.000	82.5	618.749.000	83	649.687.000	83.5	682.170.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							105.000.000		110.250.000		115.762.000		121.550.000		127.628.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	4	105.000.000	4	110.250.000	4	115.762.000	4	121.550.000	4	127.628.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							214.725.000		225.461.000		236.734.000		248.571.000		260.999.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	35000	4	4	214.725.000	4	225.461.000	4	236.734.000	4	248.571.000	4	260.999.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi

		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							63.000.000		66.150.000		69.457.000		72.930.000		76.576.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	63.000.000	1	66.150.000	1	69.457.000	1	72.930.000	1	76.576.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							178.500.000		187.425.000		196.796.000		206.636.000		216.967.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	178.500.000	1	187.425.000	1	196.796.000	1	206.636.000	1	216.967.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								36.750.000		38.587.000		40.516.000		42.542.000		44.669.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	N/A	20	36.750.000	20	38.587.000	20	40.516.000	20	42.542.000	20	44.669.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							36.750.000		38.587.000		40.516.000		42.542.000		44.669.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	36.750.000	N/A	38.587.000	N/A	40.516.000	N/A	42.542.000	N/A	44.669.000	Unit Pengelolaan Asrama	JAWA TENGAH OPD Provinsi

																			Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								3.629.026.000		3.810.477.000		4.001.000.000		4.201.050.000		4.411.102.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	N/A	N/A	3.629.026.000	N/A	3.810.477.000	N/A	4.001.000.000	N/A	4.201.050.000	N/A	4.411.102.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.260.000		1.323.000		1.389.000		1.458.000		1.531.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama	

																				Donohudan Kelas B	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.260.000	1	1.323.000	1	1.389.000	1	1.458.000	1	1.531.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							1.228.500.000		1.289.925.000		1.354.421.000		1.422.142.000		1.493.249.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	1.228.500.000	1	1.289.925.000	1	1.354.421.000	1	1.422.142.000	1	1.493.249.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							2.399.266.000		2.519.229.000		2.645.190.000		2.777.450.000		2.916.322.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	2.399.266.000	1	2.519.229.000	1	2.645.190.000	1	2.777.450.000	1	2.916.322.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.875.401.000		2.723.366.000		3.328.501.000		3.494.926.000		3.933.234.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	730	730	730	1.875.401.000	730	2.723.366.000	730	3.328.501.000	730	3.494.926.000	730	3.933.234.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	

		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							139.230.000		146.191.000		153.501.000		161.176.000		169.234.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	15	15	15	139.230.000	15	146.191.000	15	153.501.000	15	161.176.000	15	169.234.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							73.500.000		77.175.000		200.000.000		210.000.000		220.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	350	350	350	73.500.000	350	77.175.000	350	200.000.000	350	210.000.000	350	220.500.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							842.421.000		1.000.000.000		1.400.000.000		1.470.000.000		1.543.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	350	350	350	842.421.000	350	1.000.000.000	350	1.400.000.000	350	1.470.000.000	350	1.543.500.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							820.250.000		1.500.000.000		1.575.000.000		1.653.750.000		2.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	

						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	15	15	15	820.250.000	15	1.500.000.000	15	1.575.000.000	15	1.653.750.000	15	2.000.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah *												7.270.161.584.000		7.532.612.312.000		8.210.864.884.000		8.843.843.726.000		9.477.252.763.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
							Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah *	%	97.75	97.8	97.85		97.9		97.95		98		98.05		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan **											7.270.161.584.000		7.532.612.312.000		8.210.864.884.000		8.843.843.726.000		9.477.252.763.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
							Persentase realisasi APBD **	%	93.2	94	94.2	3.503.335.000	94.4	3.767.435.000	94.6	3.955.806.000	94.8	4.849.008.000	95	5.286.461.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ***									3.503.335.000		3.767.435.000		3.955.806.000		4.849.008.000		5.286.461.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
						Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel ***	%	100	100	100	3.503.335.000	100	3.767.435.000	100	3.955.806.000	100	4.849.008.000	100	5.286.461.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
		5.02.02.1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah ****								2.374.700.000		2.493.432.000		2.618.103.000		2.749.008.000		2.886.461.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	

					Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas	Jumlah Dokumen Manajemen Kas yang telah disusun ****	Dokumen	1	1	1	913.346.000	1	959.012.000	1	1.006.963.000	1	1.057.311.000	1	1.110.177.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	
		5.02.02.1.03.0001			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah *****							365.338.000		383.604.000		402.785.000		422.924.000		444.070.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
						Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah *****	Dokumen	41	41	4	365.338.000	4	383.604.000	4	402.785.000	4	422.924.000	4	444.070.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		5.02.02.1.03.0009			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait *****							548.008.000		575.408.000		604.178.000		634.387.000		666.107.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
						Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait *****	Dokumen	49	49	3	548.008.000	3	575.408.000	3	604.178.000	3	634.387.000	3	666.107.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
						Terlaksananya pembinaan penatausahaan dalam penyusunan dokumen anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD ****	Dokumen	N/A	N/A	2	756.773.000	2	794.611.000	2	834.341.000	2	876.058.000	2	919.862.000	Pokja Verifikasi Dokumen Keuangan	
		5.02.02.1.03.0003			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD *****							548.008.000		575.408.000		604.178.000		634.387.000		666.107.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	

					Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD *****	Dokumen	4	4	4	548.008.000	4	575.408.000	4	604.178.000	4	634.387.000	4	666.107.000	Pokja Verifikasi Dokumen Keuangan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		5.02.02.1.03.0011			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota *****						208.765.000		219.203.000		230.163.000		241.671.000		253.755.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
					Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	N/A	70	208.765.000	70	219.203.000	70	230.163.000	70	241.671.000	70	253.755.000	Pokja Verifikasi Dokumen Keuangan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
					Tersusunnya Juknis dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Jumlah Dokumen Juknis Transaksi Non Tunai ****	Dokumen	N/A	N/A	2	704.581.000	2	739.809.000	2	776.799.000	2	815.639.000	2	856.422.000	Pokja Penatausahaan Keuangan	
		5.02.02.1.03.0006			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank *****						548.008.000		575.408.000		604.178.000		634.387.000		666.107.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
					Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank *****	Dokumen	43	43	2	548.008.000	2	575.408.000	2	604.178.000	2	634.387.000	2	666.107.000	Pokja Penatausahaan Keuangan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

		5.02.02.1.03.0010			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan *****							156.573.000		164.401.000		172.621.000		181.252.000		190.315.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
						Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan *****	Dokumen	N/A	N/A	2	156.573.000	2	164.401.000	2	172.621.000	2	181.252.000	2	190.315.000	Pokja Penatausahaan Keuangan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		5.02.02.1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah ****								1.128.635.000		1.274.003.000		1.337.703.000		2.100.000.000		2.400.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
						Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan	Jumlah Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan yang tersusun ****	Dokumen	2	2	2	1.128.635.000	2	1.274.003.000	2	1.337.703.000	2	2.100.000.000	2	2.400.000.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	
		5.02.02.1.06.0002			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah *****							867.679.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.500.000.000		1.600.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	

						Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah *****	Dokumen	1	2	2	867.679.000	2	1.000.000.000	2	1.050.000.000	2	1.500.000.000	2	1.600.000.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		5.02.02.1.06.0003			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi *****							260.956.000		274.003.000		287.703.000		600.000.000		800.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
						Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi *****	Orang	N/A	N/A	49	260.956.000	49	274.003.000	49	287.703.000	49	600.000.000	49	800.000.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
							Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan **	%	100	100	100	7.262.123.728.000	100	7.523.816.660.000	100	8.201.629.450.000	100	8.832.841.491.000	100	9.465.415.412.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ***									7.253.508.065.000		7.514.486.815.000		8.191.833.114.000		8.822.199.477.000		9.454.061.296.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersusunnya dokumen belanja transfer APBD Provinsi tepat waktu	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu ***	%	100	100	100	7.253.508.065.000	100	7.514.486.815.000	100	8.191.833.114.000	100	8.822.199.477.000	100	9.454.061.296.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02.1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah ****								7.253.508.065.000		7.514.486.815.000		8.191.833.114.000		8.822.199.477.000		9.454.061.296.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT	Jumlah Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun ****	Dokumen	1	1	1	7.253.508.065.000	1	7.514.486.815.000	1	8.191.833.114.000	1	8.822.199.477.000	1	9.454.061.296.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

		5.02.02.1.05.0008			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan *****							2.828.139.837.000		2.740.777.148.000		3.041.182.159.000		3.263.625.564.000		3.454.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan *****	Laporan	1	1	1	2.828.139.837.000	1	2.740.777.148.000	1	3.041.182.159.000	1	3.263.625.564.000	1	3.454.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.1.05.0009			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak *****							25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak *****	Laporan	1	1	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	1	25.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.1.05.0010			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi *****							4.400.368.228.000		4.748.709.667.000		5.125.650.955.000		5.533.573.913.000		5.975.061.296.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi *****	Laporan	1	1	1	4.400.368.228.000	1	4.748.709.667.000	1	5.125.650.955.000	1	5.533.573.913.000	1	5.975.061.296.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ***									8.615.663.000		9.329.845.000		9.796.336.000		10.642.014.000		11.354.116.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah	Persentase Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu ***	%	100	100	100	8.059.228.000	100	8.745.590.000	100	9.182.869.000	100	9.642.014.000	100	10.124.116.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
		5.02.02.1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah ****								8.059.228.000		8.745.590.000		9.182.869.000		9.642.014.000		10.124.116.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku ****	Dokumen	2	2	2	6.587.235.000	2	7.200.000.000	2	7.560.000.000	2	7.938.000.000	2	8.334.900.000	Pokja Penyusunan Anggaran	

		5.02.02.1.01.0007			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD *****							4.098.780.000		4.400.000.000		4.620.000.000		4.851.000.000		5.093.550.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD *****	Dokumen	2	2	2	4.098.780.000	2	4.400.000.000	2	4.620.000.000	2	4.851.000.000	2	5.093.550.000	Pokja Penyusunan Anggaran	Bidang Anggaran
		5.02.02.1.01.0008			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD *****							2.488.455.000		2.800.000.000		2.940.000.000		3.087.000.000		3.241.350.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD *****	Dokumen	2	2	2	2.488.455.000	2	2.800.000.000	2	2.940.000.000	2	3.087.000.000	2	3.241.350.000	Pokja Penyusunan Anggaran	Bidang Anggaran
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku ****	Dokumen	2	2	2	292.270.000	2	306.882.000	2	322.226.000	2	338.338.000	2	355.256.000	Pokja Perencanaan Anggaran	
		5.02.02.1.01.0001			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS *****							146.135.000		153.441.000		161.113.000		169.169.000		177.628.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun *****	Dokumen	2	2	2	146.135.000	2	153.441.000	2	161.113.000	2	169.169.000	2	177.628.000	Pokja Perencanaan Anggaran	Bidang Anggaran

		5.02.02.1.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS *****							146.135.000		153.441.000		161.113.000		169.169.000		177.628.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun *****	Dokumen	2	2	2	146.135.000	2	153.441.000	2	161.113.000	2	169.169.000	2	177.628.000	Pokja Perencanaan Anggaran	Bidang Anggaran
						Tersusunnya Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah yang sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku ****	Laporan	2	2	2	875.275.000	2	919.038.000	2	964.990.000	2	1.013.240.000	2	1.063.902.000	Pokja Perencanaan Anggaran	
		5.02.02.1.01.0009			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran *****							875.275.000		919.038.000		964.990.000		1.013.240.000		1.063.902.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran *****	Dokumen	2	2	2	875.275.000	2	919.038.000	2	964.990.000	2	1.013.240.000	2	1.063.902.000	Pokja Perencanaan Anggaran	Bidang Anggaran
						Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku ****	Laporan	N/A	N/A	105	304.448.000	105	319.670.000	105	335.653.000	105	352.436.000	105	370.058.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	
		5.02.02.1.01.0013			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi *****							304.448.000		319.670.000		335.653.000		352.436.000		370.058.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi *****	Orang	N/A	N/A	105	304.448.000	105	319.670.000	105	335.653.000	105	352.436.000	105	370.058.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	Bidang Anggaran

						Tersusunnya dokumen APBD Kabupaten/Kota tepat waktu	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu ***	%	N/A	100	100	556.435.000	100	584.255.000	100	613.467.000	100	1.000.000.000	100	1.230.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
		5.02.02.1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota ****								556.435.000		584.255.000		613.467.000		1.000.000.000		1.230.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang disusun ****	Dokumen	70	70	70	556.435.000	70	584.255.000	70	613.467.000	70	1.000.000.000	70	1.230.000.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	
		5.02.02.1.02.0002			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota *****							199.931.000		209.927.000		220.423.000		300.000.000		315.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota *****	Laporan	35	35	35	199.931.000	35	209.927.000	35	220.423.000	35	300.000.000	35	315.000.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	Bidang Anggaran
		5.02.02.1.02.0003			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota *****							199.931.000		209.927.000		220.423.000		300.000.000		315.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	

						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota *****	Laporan	35	35	35	199.931.000	35	209.927.000	35	220.423.000	35	300.000.000	35	315.000.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	Bidang Anggaran
		5.02.02.1.02.0011			Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota *****							156.573.000		164.401.000		172.621.000		400.000.000		600.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran	
						Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	N/A	35	156.573.000	35	164.401.000	35	172.621.000	35	400.000.000	35	600.000.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	Bidang Anggaran
							Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun **	%	100	100	100	4.534.521.000	100	5.028.217.000	100	5.279.628.000	100	6.153.227.000	100	6.550.890.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ***									4.534.521.000		5.028.217.000		5.279.628.000		6.153.227.000		6.550.890.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Tersusunnya LKPD tepat waktu	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu ***	%	100	100	100	4.534.521.000	100	5.028.217.000	100	5.279.628.000	100	6.153.227.000	100	6.550.890.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
		5.02.02.1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota ****								696.152.000		730.958.000		767.506.000		1.200.000.000		1.260.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	

					Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang disusun ****	Dokumen	35	35	35	696.152.000	35	730.958.000	35	767.506.000	35	1.200.000.000	35	1.260.000.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	
		5.02.02.1.02.0004			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota *****							199.931.000		209.927.000		220.423.000		300.000.000		315.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
					Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota *****	Laporan	35	35	35	199.931.000	35	209.927.000	35	220.423.000	35	300.000.000	35	315.000.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
		5.02.02.1.02.0005			Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota *****							455.212.000		477.972.000		501.871.000		600.000.000		630.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	

						Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi *****	Dokumen	1	1	1	455.212.000	1	477.972.000	1	501.871.000	1	600.000.000	1	630.000.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
		5.02.02.1.02.0012			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah *****							41.009.000		43.059.000		45.212.000		300.000.000		315.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah *****	Dokumen	1	1	1	41.009.000	1	43.059.000	1	45.212.000	1	300.000.000	1	315.000.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
		5.02.02.1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ****								3.838.369.000		4.297.259.000		4.512.122.000		4.953.227.000		5.290.890.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan ****	Dokumen	1	1	1	574.910.000	1	603.654.000	1	633.837.000	1	665.529.000	1	698.806.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	
		5.02.02.1.04.0002			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban *****							373.491.000		392.165.000		411.773.000		432.362.000		453.980.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	

					Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban *****	Dokumen	1	1	1	373.491.000	1	392.165.000	1	411.773.000	1	432.362.000	1	453.980.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
		5.02.02.1.04.0004			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *****						201.419.000		211.489.000		222.064.000		233.167.000		244.826.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi *****	Laporan	1	1	1	201.419.000	1	211.489.000	1	222.064.000	1	233.167.000	1	244.826.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran ****	Dokumen	1	1	1	1.121.285.000	1	1.177.349.000	1	1.236.216.000	1	1.298.026.000	1	1.362.928.000	Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		5.02.02.1.04.0009			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah *****						291.565.000		306.143.000		321.450.000		337.522.000		354.399.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah *****	Dokumen	1	1	1	291.565.000	1	306.143.000	1	321.450.000	1	337.522.000	1	354.399.000	Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi

		5.02.02.1.04.0011			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi *****							829.720.000		871.206.000		914.766.000		960.504.000		1.008.529.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi *****	Orang	41	41	41	829.720.000	41	871.206.000	41	914.766.000	41	960.504.000	41	1.008.529.000	Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan ****	Dokumen	1	1	1	2.142.174.000	1	2.516.256.000	1	2.642.069.000	1	2.989.672.000	1	3.229.156.000	Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	
		5.02.02.1.04.0005			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi *****							1.460.025.000		1.800.000.000		1.890.000.000		2.200.000.000		2.400.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	

						Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi *****	Dokumen	1	2	2	1.460.025.000	2	1.800.000.000	2	1.890.000.000	2	2.200.000.000	2	2.400.000.000	Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	Bidang Akuntansi
		5.02.02.1.04.0008			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD *****							682.149.000		716.256.000		752.069.000		789.672.000		829.156.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi	
						Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD *****	Dokumen	1	1	1	682.149.000	1	716.256.000	1	752.069.000	1	789.672.000	1	829.156.000	Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	Bidang Akuntansi
Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah *												4.473.826.000		4.697.513.000		4.932.389.000		5.744.516.000		6.031.740.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
							Indek Pengelolaan Aset (IPA) *	Angka	3.24	3.08	3.12		3.16		3.2		3.24		3.28		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan **											4.473.826.000		4.697.513.000		4.932.389.000		5.744.516.000		6.031.740.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

							Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan **	%	100	100	100	4.473.826.000	100	4.697.513.000	100	4.932.389.000	100	5.744.516.000	100	6.031.740.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ***									4.473.826.000		4.697.513.000		4.932.389.000		5.744.516.000		6.031.740.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif ***	%	N/A	50	50.5	1.330.745.000	51	1.397.282.000	51.5	1.467.145.000	52	1.740.672.000	52.5	1.827.705.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah ****								1.330.745.000		1.397.282.000		1.467.145.000		1.740.672.000		1.827.705.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD ****	Dokumen	N/A	1	1	172.622.000	1	181.253.000	1	190.315.000	1	400.000.000	1	420.000.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0004			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah *****							172.622.000		181.253.000		190.315.000		400.000.000		420.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah *****	Dokumen	1	1	1	172.622.000	1	181.253.000	1	190.315.000	1	400.000.000	1	420.000.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah
						Terlaksananya Tindak lanjut Pengelolaan BMD	Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD ****	Dokumen	N/A	1	1	1.158.123.000	1	1.216.029.000	1	1.276.830.000	1	1.340.672.000	1	1.407.705.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	

		5.02.03.1.01.0010			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah *****							1.158.123.000		1.216.029.000		1.276.830.000		1.340.672.000		1.407.705.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah *****	Dokumen	3	3	3	1.158.123.000	3	1.216.029.000	3	1.276.830.000	3	1.340.672.000	3	1.407.705.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah
						Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Administrasi BMD yang Andal ***	%	N/A	70	70.5	1.057.256.000	71	1.110.118.000	71.5	1.165.624.000	72	1.223.905.000	72.5	1.285.100.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah ****								1.057.256.000		1.110.118.000		1.165.624.000		1.223.905.000		1.285.100.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Sertipikasi BMD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertipikasi dan Pengamanan BMD ****	Dokumen	N/A	1	1	1.057.256.000	1	1.110.118.000	1	1.165.624.000	1	1.223.905.000	1	1.285.100.750	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0007			Pengamanan Barang Milik Daerah *****							1.057.256.000		1.110.118.000		1.165.624.000		1.223.905.000		1.285.100.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah *****	Laporan	1	1	1	1.057.256.000	1	1.110.118.000	1	1.165.624.000	1	1.223.905.000	1	1.285.100.750	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah
						Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan ***	%	N/A	100	100	1.329.575.000	100	1.396.052.000	100	1.465.855.000	100	1.727.410.000	100	1.813.780.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	

		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah ****							1.329.575.000		1.396.052.000		1.465.855.000		1.727.410.000		1.813.780.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Tersusunnya dan penetapan dokumen RKBMD	Persentase Ketepatan waktu penetapan RKBMD ****	%	N/A	100	100	637.516.000	100	669.391.000	100	702.861.000	100	738.004.000	100	774.904.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0003			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah *****						637.516.000		669.391.000		702.861.000		738.004.000		774.904.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah *****	Dokumen	42	42	42	637.516.000	42	669.391.000	42	702.861.000	42	738.004.000	42	774.904.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah
						Tersusunnya dokumen Laporan BMD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD ****	%	N/A	100	100	571.498.000	100	600.072.000	100	630.076.000	100	789.406.000	100	828.876.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0005			Penatausahaan Barang Milik Daerah *****						321.498.000		337.572.000		354.451.000		500.000.000		525.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah *****	Laporan	2	2	2	321.498.000	2	337.572.000	2	354.451.000	2	500.000.000	2	525.000.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah
		5.02.03.1.01.0011			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah *****						250.000.000		262.500.000		275.625.000		289.406.000		303.876.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah *****	Laporan	N/A	N/A	1	250.000.000	1	262.500.000	1	275.625.000	1	289.406.000	1	303.876.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah

					Tersusunnya dokumen Laporan Pengawasan Pengendalian	Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian ****	%	N/A	100	100	120.561.000	100	126.589.000	100	132.918.000	100	200.000.000	100	210.000.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0009			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah *****						120.561.000		126.589.000		132.918.000		200.000.000		210.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah *****	Laporan	41	42	42	120.561.000	42	126.589.000	42	132.918.000	42	200.000.000	42	210.000.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah
						Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif ***	%	N/A	9.5	9	756.250.000	8.5	794.061.000	8	833.765.000	7.5	1.052.529.000	7	1.105.155.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah ****							756.250.000		794.061.000		833.765.000		1.052.529.000		1.105.155.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD ****	Dokumen	N/A	1	1	756.250.000	1	794.061.000	1	833.765.000	1	1.052.529.000	1	1.105.155.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0006			Inventarisasi Barang Milik Daerah *****						365.338.000		383.604.000		402.785.000		600.000.000		630.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah *****	Laporan	41	42	42	365.338.000	42	383.604.000	42	402.785.000	42	600.000.000	42	630.000.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah

		5.02.03.1.01.0012			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah *****							390.912.000		410.457.000		430.980.000		452.529.000		475.155.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah	
						Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun *****	Laporan	84	84	84	390.912.000	84	410.457.000	84	430.980.000	84	452.529.000	84	475.155.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah

Tabel 4.2.
Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029
BPKAD Provinsi Jawa Tengah

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Output*/Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	Percepatan penanganan *stunting* melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil	Pemberian PMT *Wasting*	Pemberian Makanan Tambahan untuk prevalensi *wasting* balita sebanyak 61.055 paket sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Kesehatan
		Pemberian PMT *Stunting*	Pemberian Makanan Tambahan untuk prevalensi *stunting* sebanyak 31.070 paket sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Kesehatan
		Pemberian PMT *Underweight*	Pemberian Makanan Tambahan untuk prevalensi *Underweight* sebanyak 98.450 sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Kesehatan
		Pemberian PMT Ibu Hamil KEK	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK sebanyak 213.115 paket sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Kesehatan
2	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*)	Penyediaan bantuan alat olahraga	Penyediaan bantuan alat olahraga sebanyak 576 unit sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi	Penyediaan Anggaran untuk RTLH	Penyediaan anggaran untuk RTLH sebanyak 102.000 unit sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Output*/Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
	Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional					
4	Jambanisasi 100%	Pemberian Bantuan Jamban untuk masyarakat dalam bentuk bantuan keuangan desa	50.000 unit sampai dengan akhir tahun perencanaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sekretariat	Dinas Kesehatan
5	Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Mengalokasikan anggaran untuk kenaikan belanja Tambahan Penghasilan Pegawai	Pengalokasian anggaran untuk kenaikan belanja tambahan penghasilan pegawai sesuai regulasi pada Tahun ketiga	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bidang Anggaran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengalokasian anggaran untuk kenaikan belanja tambahan penghasilan pegawai sesuai regulasi pada Tahun ketiga	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bidang Anggaran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal	Sosialisasi Perda tentang Barang Milik Daerah	Pencapaian target retribusi daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		Penyusunan dan Sosialisasi Pergub tentang Juklak/Juknis Perda	Pencapaian target retribusi daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Aset	Pencapaian target retribusi daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Utama	*Baseline* Tahun		Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	n.a	97,75	97,8%	97,91%	97,9%	97,95%	98%	98,05%	98,05%
2	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	n.a	3,24	3,08	3,12	3,16	3,20	3,24	3,28	3,28
3	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n.a	n.a	76	76	76	76	76	76	76

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator Kinerja Kunci	*Baseline* Tahun		Target Capaian Tahun						Keterangan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	11,81%	13,22%	29,57%	32,55%	31,54%	29,91%	27,98%	26,11%	
2	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	93,98%	97,54%	96,00%	96,25%	96,50%	96,75%	97,00%	97,25%	
3	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1,89%	0,12%	7,50%	3,68%	7,10%	6,81%	6,55%	7,59%	
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	34,16%	11,20%	19,95%	14,08%	19,03%	18,77%	19,94%	22,02%	
5	Persentase Penurunan SILPA	37,36%	56,01%	-5,26%	-2,04%	-4,17%	-2,04%	-5,26%	-3,09%	

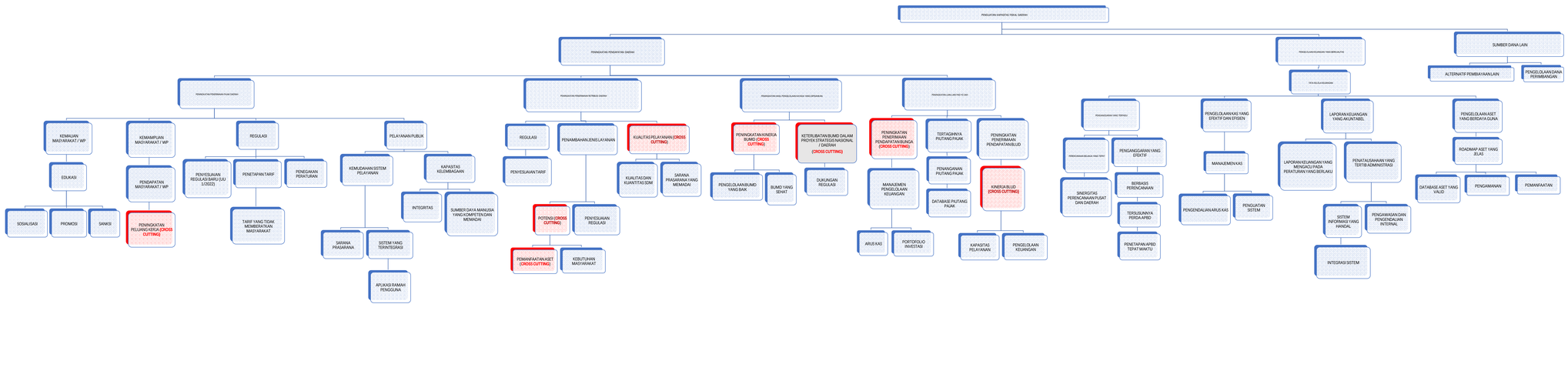
PENGELOLAAN KEPUTUNG PERAL DAERAH
PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
KEMAUAN MASYARAKAT / WP
EDUKASI
SOSIALISASI
PROMOSI
SANKSI
KEMAMPUAN MASYARAKAT / WP
PENDAPATAN MASYARAKAT / WP
PENINGKATAN PELUANG KERJA (CROSS CUTTING)
REGULASI
PENYESUAIAN REGULASI BARU (UU 1/2022)
PENETAPAN TARIF
TARIF YANG TIDAK MEMBERATKAN MASYARAKAT
PENEGAKAN PERATURAN
PELAYANAN PUBLIK
KEMUDAHAN SISTEM PELAYANAN
SARANA PRASARANA
SISTEM YANG TERINTEGRASI
APLIKASI RAMAH PENGGUNA
KAPASITAS KELEMBAGAAN
INTEGRITAS
SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETEN DAN MEMADAI
PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
REGULASI
PENYESUAIAN TARIF
PENAMBAHAN JENIS LAYANAN
POTENSI (CROSS CUTTING)
PEMANFAATAN ASET (CROSS CUTTING)
PENYESUAIAN REGULASI
KEBUTUHAN MASYARAKAT
KUALITAS PELAYANAN (CROSS CUTTING)
KUALITAS DAN KUANTITAS SDM
SARANA PRASARANA YANG MEMADAI
PENINGKATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN
PENINGKATAN KINERJA BUMD (CROSS CUTTING)
PENGELOLAAN BUMD YANG BAIK
BUMD YANG SEHAT
KETERLIBATAN BUMD DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL / DAERAH (CROSS CUTTING)
DUKUNGAN REGULASI
PENINGKATAN LAIN-LAIN PAD YG SAH
PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN/BUNGA (CROSS CUTTING)
MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN
ARUS KAS
PORTOFOLIO INVESTASI
TERTAGIHNYA PIUTANG PAJAK
PENANGANAN PIUTANG PAJAK
DATABASE PIUTANG PAJAK
PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN BLUD
KINERJA BLUD (CROSS CUTTING)
KAPASITAS PELAYANAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PENGELUARAN YANG BERKUALITAS
TATA KELOLA KEUANGAN
PENGANGGARAN YANG TEPAT(4)
PERENCANAAN BELANJA YANG TEPAT
SINERGITAS PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
PENGANGGARAN YANG EFEKTIF
BERBASIS PERENCANAAN
TERSUSUNNYA PERDA APBD
PENETAPAN APBD TEPAT WAKTU
PENGELOLAAN KAS YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
MANAJEMEN KAS
PENGENDALIAN ARUS KAS
PENGUATAN SISTEM
LAPORAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL
LAPORAN KEUANGAN YANG MENGACU PADA PERATURAN YANG BERLAKU
PENATAUSAHAAN YANG TERTIB ADMINISTASI
SISTEM INFORMASI YANG HANDAL
INTEGRASI SISTEM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL
PENGELOLAAN ASET YANG BERDAYA GUNA
DATABASE ASET YANG VALID
ROADMAP ASET YANG JELAS
PENGAMANAN
PEMANFAATAN
SUMBER DANA LAIN
ALTERNATIF PEMBIAYAAN LAIN
PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN

Cascading Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah

Dasar Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Dasar Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

TUJUAN

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata dari persentase keselarasan, persentase penyerapan anggaran, persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		

SASARAN

Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan		
Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen penganggaran yang telah disesuaikan dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dibagi Jumlah dokumen penganggaran yang wajnya dengan perencanaan dan	Mengukur hasil keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan
Persentase Realisasi APBD	Realisasi APBD dibagi total APBD x 100%	Mengukur tingkat ketercapaian Realisasi APBD
Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	jumlah perangkat daerah yang menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban dibagi keseluruhan perangkat daerah x 100%	Mengukur hasil Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Perangkat Daerah

PROGRAM

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Program

Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel		
Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan yang disusun dibagi dengan keseluruhan dokumen pengelolaan perbendaharaan dikali 100%	

Mengukur hasil pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel

Penyusnan LKPD	Jumlah Dokumen LKPD yang ditetapkan tepat waktu dibagi dengan LKPD yang disusun dikali 100%	
Persentase penyampaian LKPD tepat waktu		

Mengukur proses penyampaian LKPD tepat waktu

KEGIATAN

- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Indikator Kegiatan

Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT	Jumlah Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	Mengukur Jumlah Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun
Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	mengukur Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang disusun	mengukur Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang disusun
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	Mengukur hasil penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku
Tersusunnya Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	Mengukur hasil penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah Perubahan yang penyusunannya sesuai ketentuan yang berlaku
Tersusunnya Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah yang sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	Mengukur hasil penyusunan Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah sesuai ketentuan yang berlaku
Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penyusunan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku	Mengukur hasil Pembinaan Penyusunan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku
Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan	Jumlah Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan tersusun	Mengukur hasil penyusunan Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan
Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas	Jumlah Dokumen Manajemen Kas yang disusun	Mengukur hasil penyusunan Dokumen Manajemen Kas
Terlaksananya pembinaan pelaksanaan dalam penyusunan dokumen anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD	Mengukur hasil penyusunan dokumen anggaran kas dan SPD
Tersusunnya Juknis dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Jumlah Dokumen Juknis Transaksi Non Tunai	Mengukur hasil penyusunan Dokumen Juknis Transaksi Non Tunai
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang disusun	mengukur Jumlah Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang disusun
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan	Mengukur hasil penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran yang disusun	Mengukur hasil penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Mengukur hasil penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

SUB KEGIATAN

Analisis Pemindanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	SUB BAGIAN KEUANGAN	
Tersedianya Analisis Pemindanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Pemindanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang disusun	
Jumlah Laporan Hasil Analisis Pemindanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang disusun		
Mengukur hasil Analisis Pemindanaan dan Penyaluran		
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kapokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	
Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDKabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	
Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
Mengukur hasil Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan		
Koordinasi dan Penyusunan Kua dan PPAS	Kapokja Perencanaan Anggaran	
Tersusunnya KUA PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
Mengukur Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kapokja Penyusunan Anggaran	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Mengukur Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan		
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kapokja Penerapan Anggaran	
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
Mengukur Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan		
Pembinaan Penyusunan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Kapokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	
Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penyusunan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penyusunan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi		
Menghitung Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan		
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kapokja Pengelolaan Kas Daerah	
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
Mengukur hasil proses Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah		
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kapokja Pengelolaan Kas Daerah	
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
Mengukur hasil proses Koordinasi dan Pengelolaan		
Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kapokja Verifikasi Dokumen Keuangan	
Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
Mengukur jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Pemerintah		
Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kapokja Verifikasi Dokumen Keuangan	
Terlaksananya Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
Mengukur hasil proses Penyajian, Pelaksanaan		
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kapokja Pemutakhiran Keuangan	
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Mengukur hasil proses Koordinasi, Pelaksanaan Kerja		
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Kapokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	
Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	
Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
Mengukur Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan		
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kapokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		
Mengukur hasil proses Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,		
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kapokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	
Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
Mengukur hasil proses penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis		
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kapokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	
Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		
Mengukur hasil proses Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan		
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	SUB BAGIAN KEUANGAN	
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang disusun	
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Mengukur hasil pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kapokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	
Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBDKabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	
Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
Mengukur hasil Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kapokja Perencanaan Anggaran	
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	
Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
Mengukur Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kapokja Penyusunan Anggaran	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Mengukur Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan		
Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kapokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	
Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		
Mengukur hasil Pembinaan Implementasi Sistem Informasi		
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	SUB BAGIAN KEUANGAN	
Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi yang disusun.	
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
Mengukur hasil penyaluran Dana bag Hasil Provinsi		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kapokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		
Mengukur Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan		
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemutakhiran dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kapokja Pemutakhiran Keuangan	
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemutakhiran dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemutakhiran dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemutakhiran dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		
Mengukur hasil proses dan penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan		
Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kapokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	
Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	
Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi		
Mengukur Hasil Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penyetoran atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kapokja Pengelolaan Kas Daerah	
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penyetoran atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penyetoran atas SP2D dengan Instansi Terkait	
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan		
Mengukur hasil proses Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan		
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kapokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
Mengukur jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kapokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		
Mengukur Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan		
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kapokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	
Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
Mengukur hasil proses penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis		
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kapokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		
Mengukur jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kapokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		
Mengukur hasil proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan		

Cascading Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah

Dasar Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

TUJUAN

Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah beinorgitas dan dinamis

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

(Nilai x Bobot Komponen Penguungkit) + (Nilai x Bobot Komponen Hasil)

Indeks RB mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan, yang diukur dari: umpan balik (penungkit) (meliputi 8 area perubahan) dan komponen hasil

SASARAN

Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah

Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Total (Nilai komponen MR x Bobot)

Ukuran yang menggambarkan implementasi manajemen risiko di lingkup perangkat daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Nilai hasil survei kepuasan masyarakat dari 9 unsur SKM (skala 1-4) yang dikonversi menjadi IKM

IKM untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, yang didapatkan dari survei kepuasan masyarakat

PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

KEGIATAN

Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SUB BAGIAN PROGRAM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SUB BAGIAN KEUANGAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

INDIKTOR KEGIATAN

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah

(Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan-undangan)/(Jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun) x 100%

Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan

Mengukur tingkat kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang [illegible]

Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah

Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun

Total dari seluruh jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang difasilitasi dari seluruh sub kegiatan

Mengukur hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah setiap tahun

Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan

Rata-rata (Realisasi Sub Kegiatan1/Target Sub Kegiatan) x 100%)

Mengukur kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah berdasar dengan SOP yang berlaku

Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah

Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan

Rata-rata (Realisasi Sub Kegiatan1/Target Sub Kegiatan) x 100%)

Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal

Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang memiliki/ nilai aset

Jumlah total barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang memiliki/ nilai aset

Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan

Mengukur hasil pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang memiliki/ nilai aset [illegible]

Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah

Jumlah total laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan

Mengukur hasil penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah

Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

Total dari seluruh jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang difasilitasi dari seluruh sub kegiatan

Mengukur hasil pelaksanaan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Jumlah total unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi pemeliharaan

Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan

Mengukur hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang [illegible]

SUB KEGIATAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subbag Program	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Subbag Keuangan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Subbag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Mebel	Subbag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Subbag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Subbag Umum dan Kepegawaian

INDIKATOR SUB KEGIATAN

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	**Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Tersedianya Mebel**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	

Mengukur jumlah jenis dokumen perencanaan yang difasilitasi oleh perangkat daerah

Mengukur besaran jumlah ASN yang dibiayai dari gaji dan tunjangan daerah satu tahun

Mengukur jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Mengukur penyediaan instalasi listrik dan alat kelistrikan/penerangan kantor dalam satu tahun

Mengukur jumlah jenis mebel perkantoran yang disediakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun

Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos

Mengukur hasil pengamanan barang milik daerah perangkat daerah

Mengukur jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subbag Program	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Subbag Keuangan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Subbag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - AHD	Subbag Tata Usaha AHD	Pengadaan Mebel - AHD	Subbag Tata Usaha AHD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat AHD	Subbag Tata Usaha AHD			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan - AHD	Subbag Tata Usaha AHD
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	**Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	**Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Tersedianya Mebel**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			**Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertizinannya
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertizinannya	

Mengukur lemah jenis laporan evaluasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah

Mengukur hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN tersebarkan untuk honorarium pengelola keuangan dan pejabat pengadaan

Mengukur jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan untuk seluruh ASN dalam satu tahun

Mengukur penyediaan instalasi listrik dan alat kelistrikan/penerangan kantor dalam satu tahun

Mengukur jumlah jenis mebel perkantoran yang disediakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun

Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Subbag Program	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Subbag Keuangan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subbag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Subbag Umum dan Kepegawaian			Pemeliharaan Mebel	Subbag Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun**	Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah			**Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			**Terlaksananya Pemeliharaan Mebel**	Jumlah Mebel yang Dipelihara
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Jumlah Mebel yang Dipelihara	

1. Definisi: Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data pada

Mengukur hasil penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah

Mengukur jumlah peralatan dan perlengkapan kantor fisik pakai yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset dalam satu

Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pendukung kegiatan perangkat daerah yang disediakan (sesuai kebutuhan perangkat daerah)

Mengukur hasil dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah dalam satu tahun

Mengukur jumlah mebel pada perangkat daerah yang diikuti pemeliharaan dalam satu tahun

						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - AHD	Subbag Tata Usaha AHD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - AHD	Subbag Tata Usaha AHD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subbag Umum dan Kepegawaian
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	

Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya

Mengukur hasil dari penyediaan jasa komunikasi, sumber

Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya

						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - AHD	Subbag Tata Usaha AHD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - AHD	Subbag Tata Usaha AHD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subbag Umum dan Kepegawaian
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	

Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya

Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya

						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Subbag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Subbag Umum dan Kepegawaian
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	**Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

Mengukur penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk

Mengukur jumlah sarana dan prasarana pendukung

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Subbag Tata Usaha AHD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - AHD	Subbag Tata Usaha AHD	Pemeliharaan Mebel - AHD	Subbag Tata Usaha AHD
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Terlaksananya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau**	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	**Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Terlaksananya Pemeliharaan Mebel**	Jumlah Mebel yang Dipelihara
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Jumlah Mebel yang Dipelihara	

Mengukur layanan fasilitasi kunjungan tamu kelembagaan

Mengukur jumlah sarana dan prasarana pendukung

Mengukur jumlah mebel pada perangkat daerah

						Fasilitasi Kunjungan Tamu - AHD	Subbag Tata Usaha AHD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Subbag Umum dan Kepegawaian			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - AHD	Subbag Umum dan Kepegawaian
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung**	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			**Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

Mengukur layanan fasilitasi kunjungan tamu kelembagaan

Mengukur jumlah sarana dan prasarana pendukung

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

						Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subbag Umum dan Kepegawaian						
						Terlaksananya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi

						Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - AHD	Subbag Tata Usaha AHD						
						Terlaksananya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi

						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Subbag Umum dan Kepegawaian						
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah						
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							

Mengukur layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada

Cascading Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Provinsi Jawa Tengah

Dasar Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Dasar Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Konversi IPA ke Dalam Indeks	
IPA	Indeks
3 < IPA ≤ 4	Sangat Baik
2 < 1PA ≤3	Baik
1< IPA ≤ 2	Cukup
IPA ≤ 1	Buruk

Target Tujuan di RPJMD

Mengukur kualitas tata kelola BMD melalui Indek Pengelolaan Aset

2 < IPA ≤4

nilai IPA Baik/Sangat Baik mempertimbangkan dalam penilaian IPA tidak hanya tergantung pada upaya internal untuk melaksanakan Pengelolaan BMD, namun juga mendasarkan pada kinerja eksternal dalam melakukan penilaian (Irjen/BPK) serta mendukung upaya pencapaian target dalam pengelolaan BMD (Kantah)

TUJUAN

Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	=Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif+Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan+Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif+ Administrasi BMD yang Andal pada keseluruhan OPD
Indek Pengelolaan Aset (IPA)	

SASARAN

Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan	Jumlah OPD yang mengelola Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi jumlah keseluruhan OPD
Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan	

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

PROGRAM

Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Nilai Temuan BPK atas LKPD terkait BMD dibagi Nilai (Persediaan + Aset Tetap + Aset Tidak Berwujud) pada Laporan BMD x 70%)+ (Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD dibagi Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD x 30%)
Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	

Mengukur progres negatif Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif

Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah dokumen RKBMD yang ditetapkan tepat waktu dibagi dengan dokumen RKBMD yang disusun x 100%)+ (Jumlah Pengguna Barang yang menyerahkan laporan BMD semesteran tepat waktu dibagi Jumlah Pengguna Barang x 100%)+ (Jumlah Pengguna Barang yang menyerahkan Laporan Pengawasan Pengendalian tepat waktu dibagi Jumlah Pengguna Barang x 100%)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	

Mengukur Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan tahun sebelumnya dibagi Total jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD sampai dengan tahun sebelumnya x 43%)+(Jumlah BMD atas pemanfaatan,pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan
Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	

Mengukur Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif

Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan tahun sebelumnya dibagi Total jumlah bidang tanah sampai dengan tahun sebelumnya x 50%)+(Nilai perolahan tanah yang telah bersertifikat sampai dengan tahun sebelumnya dibagi Total nilai perolehan tanah sampai dengan tahun sebelumnya x 50%)
Tingkat Administrasi BMD yang Andal	

Mengukur Administrasi BMD yang Andal

Pengelolaan Barang Milik Daerah

KEGIATAN

Terlaksananya Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD
Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	

Mengukur pelaksanaan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD

Tersusunnya dan penetapan dokumen RKBMD	Jumlah dokumen RKBMD yang ditetapkan tepat waktu dibagi dengan dokumen RKBMD yang disusun x 100%
Persentase Ketepatan waktu penetapan RKBMD	

Mengukur jumlah penetapan RKBMD yang tepat waktu

Tersusunnya dokumen Laporan BMD	Jumlah Pengguna Barang yang menyerahkan laporan BMD semesteran tepat waktu dibagi Jumlah Pengguna Barang x 100%
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD	

Mengukur jumlah laporan BMD semesteran diserahkan yang tepat

Tersusunnya dokumen Laporan Pengawasan Pengendalian	Jumlah Pengguna Barang yang menyerahkan Laporan Pengawasan Pengendalian tepat waktu dibagi Jumlah Pengguna Barang x 100%
Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	

Mengukur jumlah Laporan Pengawasan Pengendalian diserahkan

Terlaksananya Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD
Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	

Mengukur pelaksanaan Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI

Terlaksananya Tindak lanjut Pengelolaan BMD	Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD
Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD	

Mengukur pelaksanaan Tindak lanjut Pengelolaan BMD

Terlaksananya Sertipikasi BMD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertipikasi dan Pengamanan BMD
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertipikasi dan Pengamanan BMD	

Mengukur pelaksanaan Sertipikasi BMD

SUB KEGIATAN

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kapokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah

Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	

Mengukur Hasil Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kapokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	

Mengukur Hasil Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan

Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kapokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	

Mengukur Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kapokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	

Mengukur Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kapokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah

Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	

Mengukur Hasil Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kapokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	

Mengukur Hasil Pelaksanaan Optimalisasi Penggunaan,

Pengamanan Barang Milik Daerah	Kapokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	

Mengukur Hasil Pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kapokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah

Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	

Mengukur Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kapokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

Mengukur Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka

DINAS/OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terdapat salah input anggaran dalam sistem	Risiko Operasional	Ketidakcermatan pegawai	Penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	BPKAD
2	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pencairan SPJ kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Risiko Operasional	Sistem keuangan error	Terganggunya pengelolaan anggaran	BPKAD
3	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	SP2D ditandatangani terlambat	Risiko Operasional	Keterlambatan dalam verifikasi anggaran dan administrasi dari OPD	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, terhambatnya program-program yang bergantung pada dana tersebut	OPD terkait
4	Sasaran Strategis	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Efisiensi anggaran	Risiko Strategis	Perubahan regulasi pusat terkait penganggaran APBN dan APBD	Penurunan Kualitas Layanan Publik	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
5	Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	Laporan tidak tersedia sesuai tenggat waktu atau tidak lengkap	Risiko Kepatuhan	Keterlambatan dalam pengumpulan data atau revisi data	Potensi masalah dalam evaluasi pertanggungjawaban APBD dan keterlambatan penyaluran dana transfer	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
6	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan BMD tidak terintegrasi dengan data keuangan lainnya	Risiko Operasional	Tidak terintegrasinya sistem keuangan dan sistem BMD	Laporan yang tidak akurat, masalah sinkronisasi data	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

DINAS/OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terdapat salah input anggaran dalam sistem	2	5	10	Ada	Melakukan pengendalian melalui verifikasi manual dan aplikasi pendamping (e planning dan e budgeting)	Memadai	1	5	5
Pencairan SPJ kegiatan tidak dapat dilaksanakan	2	5	10	Ada	Melakukan verifikasi manual serta pengendalian dengan menggunakan aplikasi pendamping (ebudgeting dan epenatausahaan)	Memadai	1	5	5
SP2D ditandatangani terlambat	2	5	10	Ada	Melakukan monitoring serta asistensi kepada seluruh OPD dalam rangka tertib administrasi berdasarkan pedoman penatausahaan	Memadai	1	5	5
Efisiensi anggaran	2	5	10	Ada	Melakukan identifikasi dan memberikan skala prioritas kepada seluruh OPD dalam rangka pemenuhan kebutuhan	Memadai	1	5	5
Laporan tidak tersedia sesuai tenggat waktu atau tidak lengkap	2	5	10	Ada	Melakukan monitoring serta asistensi kepada seluruh OPD dalam rangka tertib laporan sesuai jadwal pertanggungjawaban	Memadai	1	5	5
Laporan BMD tidak terintegrasi dengan data keuangan lainnya	2	5	10	Ada	Melakukan identifikasi dan reksonsiliasi laporan BMD dan didukung oleh monitoring serta asistensi kepada seluruh OPD dalam rangka tertib laporan sesuai jadwal	Memadai	1	5	5

DINAS/OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pernyataan Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terdapat salah input anggaran dalam sistem	5	Sekretariat	Ketidakcermatan pegawai	Penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
Pencairan SPJ kegiatan tidak dapat dilaksanakan	5	Sekretariat	Sistem keuangan error	Terganggunya pengelolaan anggaran
SP2D ditandatangani terlambat	5	Bidang Perbendaharaan dan Kasda	Keterlambatan dalam verifikasi anggaran dan administrasi dari OPD	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, terhambatnya program-program yang bergantung pada dana tersebut
Efisiensi anggaran	5	Kepala BPKAD	Perubahan regulasi pusat terkait penganggaran APBN dan APBD	Penurunan Kualitas Layanan Publik
Laporan tidak tersedia sesuai tenggat waktu atau tidak lengkap	5	Bidang Akuntansi	Keterlambatan dalam pengumpulan data atau revisi data	Potensi masalah dalam evaluasi pertanggungjawaban APBD dan keterlambatan penyaluran dana transfer
Laporan BMD tidak terintegrasi dengan data keuangan lainnya	5	Bidang Aset Daerah	Tidak terintegrasinya sistem keuangan dan sistem BMD	Laporan yang tidak akurat, masalah sinkronisasi data

DINAS/OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terdapat salah input anggaran dalam sistem	5	Ketidakcermatan pegawai	Penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan			
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pencairan SPJ kegiatan tidak dapat dilaksanakan	5	Sistem keuangan error	Terganggunya pengelolaan anggaran			
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	SP2D ditandatangani terlambat	5	Keterlambatan dalam verifikasi anggaran dan administrasi dari OPD	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, terhambatnya program-program yang bergantung pada dana tersebut			
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Efisiensi anggaran	5	Perubahan regulasi pusat terkait penganggaran APBN dan APBD	Penurunan Kualitas Layanan Publik			
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	Laporan tidak tersedia sesuai tenggat waktu atau tidak lengkap	5	Keterlambatan dalam pengumpulan data atau revisi data	Potensi masalah dalam evaluasi pertanggungjawaban APBD dan keterlambatan penyaluran dana transfer			
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan BMD tidak terintegrasi dengan data keuangan lainnya	5	Tidak terintegrasinya sistem keuangan dan sistem BMD	Laporan yang tidak akurat, masalah sinkronisasi data			

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyusun dokumen RPJMD dan menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun dokumen Renstra. Dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk periode tahun 2025-2030 serta penjabaran visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang tertuang di RPJMD Tahun 2025-2029, maka seluruh perangkat daerah juga secara paralel menyusun dokumen Renstra Tahun 2025-2029 sebagai turunan RPJMD Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan tujuan daerah dalam kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025-2029 di bidang kepegawaian, sehingga Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah difokuskan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan manajemen ASN berbasis sistem merit dengan memperhatikan : (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029; (2) Hasil Evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan 2024-2026; (3) Isu-Isu Strategis yang berkembang; (4) Kebijakan Nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Fungsi dilaksanakannya penyusunan Renstra dalam adalah sebagai pedoman strategis yang mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah diantaranya sebagai Instrumen Perencanaan, Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah, Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Instrumen Pengendalian dan Evaluasi, Dasar Penyusunan Anggaran serta Alat Sinergi dan Koordinasi dengan tahapan : 1). Teknokratik (dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran); 2). Partisipatif (melibatkan berbagai pemangku kepentingan); 3). Politis (dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih); 4). Konsep atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Dokumen Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan/pedoman dalam menyusun Renja Tahunan BKD Povinsi Jawa Tengah. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Tahapan penyusunan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Renstra

Persiapan penyusunan renstra meliputi : a. Penyusunan rancangan keputusan tentang pembentukan tim penyusunan Renstra; b. Orientasi mengenai Renstra; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun; dan d. Penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
   Penyusunan rancangan awal Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, mencakup: a. Analisis gambaran pelayanan; b. Analasis permasalahan; c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d. Analisis isu strategis; e. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; f. Perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja; dan g. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Rancangan Awal Renstra disempurnakan melalui Forum Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam Berita Acara, memuat penajaman terhadap target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan lokasi.
4. Penyusunan Rancangan Renstra
   Rancangan Renstra merupakan hasil penyempurnaan Rancangan Awal Renstra setelah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam Berita Acara Rancangan Renstra disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal Renstra. Verifikasi oleh Bappeda terhadap Rancangan Renstra bertujuan untuk memastikan Rancangan Renstra telah selaras dengan Rancangan Awal Renstra dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra
   Perumusan Rancangan Akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra berdasarkan Peraturan Daerah RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah RPJMD.
6. Penetapan Renstra
   Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah RPJMD ditetapkan. Verifikasi dilakukan untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam Renstra selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RPJMD. Rancangan Akhir Renstra yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada

Kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah RPJMD ditetapkan. Renstra yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan bersifat sektoral yang disusun berpedoman kepada RPJMD, sebagai bentuk penjabaran RPJMD, sedangkan kaitannya dengan Renstra K/L dan Kabupaten/Kota adalah bersifat sinergi. Selanjutnya hubungan Renstra dengan Renja adalah Renstra merupakan acuan dalam penyusunan Renja sebagai satu bentuk kesatuan perencanaan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6264);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (5-06/2025);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi ini bertujuan untuk memutakhirkan dan memverifikasi data perencanaan dan keuangan daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bidang Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah :

a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
b. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah;

c. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan bidang kepegawaian di BKD Provinsi Jawa Tengah baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang (pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD, dan Renja PD), landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BKD Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki BKD Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026, dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah ini.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat uraian tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan serta strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan sebagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai, serta memuat arah kebijakan yang dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya serta penjelasan sub kegiatan yang mendukung

program-program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Juga memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan BKD Provinsi Jawa Tengah.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BKD PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian sebagai turunannya adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang mana pada saat penyusunan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 penyusunan Pergub SOTK masih berlangsung dan menuggu untuk ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BKD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dutugaskan Kepala Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, bidang mutasi dan promosi, bidang pengembangan kompetensi, bidang pembinaan dan penilaian kinerja;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, bidang mutasi dan promosi, bidang pengembangan kompetensi, bidang pembinaan dan penilaian kinerja;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, bidang mutasi dan promosi, bidang pengembangan kompetensi, bidang pembinaan dan penilaian kinerja;
d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian.
   Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian, melaksanakan fungsi :
   a. perumusan kebijakan terkait penyusunan daftar formasi pegawai, pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), penetapan keputusan pemberhentian ASN, pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pembinaan profesi ASN, perlindungan hukum bagi ASN;
   b. pelaksanaan kebijakan terkait penyusunan daftar formasi pegawai, pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), penetapan keputusan pemberhentian ASN, pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pembinaan profesi ASN, perlindungan hukum bagi ASN;
   c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penyusunan daftar formasi pegawai, pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), penetapan keputusan pemberhentian ASN, pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pembinaan profesi ASN, perlindungan hukum bagi ASN;
   d. monitoring dan evaluasi terkait penyusunan daftar formasi pegawai, pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), penetapan keputusan pemberhentian ASN, pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi

kepegawaian, pembinaan profesi ASN, perlindungan hukum bagi ASN;

e. pelaporan dan rekomendasi terkait penyusunan daftar formasi pegawai, pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), penetapan keputusan pemberhentian ASN, pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pembinaan profesi ASN, perlindungan hukum bagi ASN;dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Mutasi Dan Promosi.

   Dalam melaksanakan tugas, Bidang Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi :

   a. perumusan kebijakan terkait, penetapan pindah ASN, penetapan keputusan dalam Jabatan Pelaksana, pengembangan karir dan pelantikan Jabatan Manajerial, persetujuan penunjukan Pengarah dan/atau Ketua Kelompok Kerja, penetapan keputusan kenaikan pangkat, penetapan pemberian cuti pegawai, pengambilan sumpah janji ASN, penetapan peninjauan masa kerja, evaluasi jabatan manajerial, penetapan keputusan kenaikan gaji berkala bagi Jabatan Pimpinan Tinggi;
   b. pelaksanaan kebijakan terkait, penetapan pindah ASN, penetapan keputusan dalam Jabatan Pelaksana, pengembangan karir dan pelantikan Jabatan Manajerial, persetujuan penunjukan Pengarah dan/atau Ketua Kelompok Kerja, penetapan keputusan kenaikan pangkat, penetapan pemberian cuti pegawai, pengambilan sumpah janji ASN, penetapan peninjauan masa kerja, evaluasi jabatan manajerial, penetapan keputusan kenaikan gaji berkala bagi Jabatan Pimpinan Tinggi;
   c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, penetapan pindah ASN, penetapan keputusan dalam Jabatan Pelaksana, pengembangan karir dan pelantikan Jabatan Manajerial, persetujuan penunjukan Pengarah dan/atau Ketua Kelompok Kerja, penetapan keputusan kenaikan pangkat, penetapan pemberian cuti pegawai, pengambilan sumpah janji ASN, penetapan peninjauan masa kerja, evaluasi jabatan manajerial, penetapan keputusan kenaikan gaji berkala bagi Jabatan Pimpinan Tinggi;
   d. monitoring dan evaluasi terkait, penetapan pindah ASN, penetapan keputusan dalam Jabatan Pelaksana, pengembangan karir dan pelantikan Jabatan Manajerial, persetujuan penunjukan Pengarah dan/atau Ketua Kelompok Kerja, penetapan keputusan kenaikan pangkat, penetapan pemberian

cuti pegawai, pengambilan sumpah janji ASN, penetapan peninjauan masa kerja, evaluasi jabatan manajerial, penetapan keputusan kenaikan gaji berkala bagi Jabatan Pimpinan Tinggi;

e. pelaporan dan rekomendasi terkait, penetapan pindah ASN, penetapan keputusan dalam Jabatan Pelaksana, pengembangan karir dan pelantikan Jabatan Manajerial, persetujuan penunjukan Pengarah dan/atau Ketua Kelompok Kerja, penetapan keputusan kenaikan pangkat, penetapan pemberian cuti pegawai, pengambilan sumpah janji ASN, penetapan peninjauan masa kerja, evaluasi jabatan manajerial, penetapan keputusan kenaikan gaji berkala bagi Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Kompetensi.

   Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

   a. perumusan kebijakan terkait, pelantikan jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah, penetapan keputusan pemberian tugas belajar dan izin belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan kebijakan terkait, pelantikan jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah, penetapan keputusan pemberian tugas belajar dan izin belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, pelantikan jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah, penetapan keputusan pemberian tugas belajar dan izin belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. monitoring dan evaluasi terkait, pelantikan jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah, penetapan keputusan pemberian tugas belajar dan izin belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, dan

pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaporan dan rekomendasi terkait, pelantikan jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah, penetapan keputusan pemberian tugas belajar dan izin belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, dan pengembangan kompetensi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pembinaan Dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Dan Penilaian Kinerja.
   Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Dan Penilaian Kinerja menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan kinerja, pengelolaan pemberian penghargaan ASN, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, pembinaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku bagi ASN, penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian;
   b. pelaksanaan kebijakan terkait, pengelolaan kinerja, pengelolaan pemberian penghargaan ASN, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, pembinaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku bagi ASN, penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian;
   c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait, pengelolaan kinerja, pengelolaan pemberian penghargaan ASN, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, pembinaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku bagi ASN, penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian;
   d. monitoring dan evaluasi terkait, pengelolaan kinerja, pengelolaan pemberian penghargaan ASN, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, pembinaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku bagi ASN, penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian;
   e. pelaporan dan rekomendasi terkait, pengelolaan kinerja, pengelolaan pemberian penghargaan ASN, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, pembinaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku bagi ASN, penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian; dan
   f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Penilai Kompetensi ASN diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ..... Tahun 2025 merupakan

unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penilaian kompetensi ASN yang dipimpin oleh Kepala Unit dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Penilai Kompetensi ASN menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN, pemberian umpan balik terhadap hasil penilaian kompetensi ASN, dan pengendalian mutu pelaksanaan penilaian kompetensi ASN;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN, pemberian umpan balik terhadap hasil penilaian kompetensi ASN, dan pengendalian mutu pelaksanaan penilaian kompetensi ASN;
c. evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN, pemberian umpan balik terhadap hasil penilaian kompetensi ASN, dan pengendalian mutu pelaksanaan penilaian kompetensi ASN;
d. pengelolaan ketatausahaan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dna mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala UPT Badan atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Fungsional.

2.1.2.Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Subbagian Program;
   b. Subbagian Keuangan;
   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Kompetensi,
4. Bidang Mutasi dan Promosi,
5. Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja,
6. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian,
7. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi ASN,
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
   a. Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur;

b. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur;
c. Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
d. Jabatan Fungsional Arsiparis.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan dalam gambar 2.1. berikut:

Gambar 2. 1
SOTK BKD Provinsi Jawa Tengah

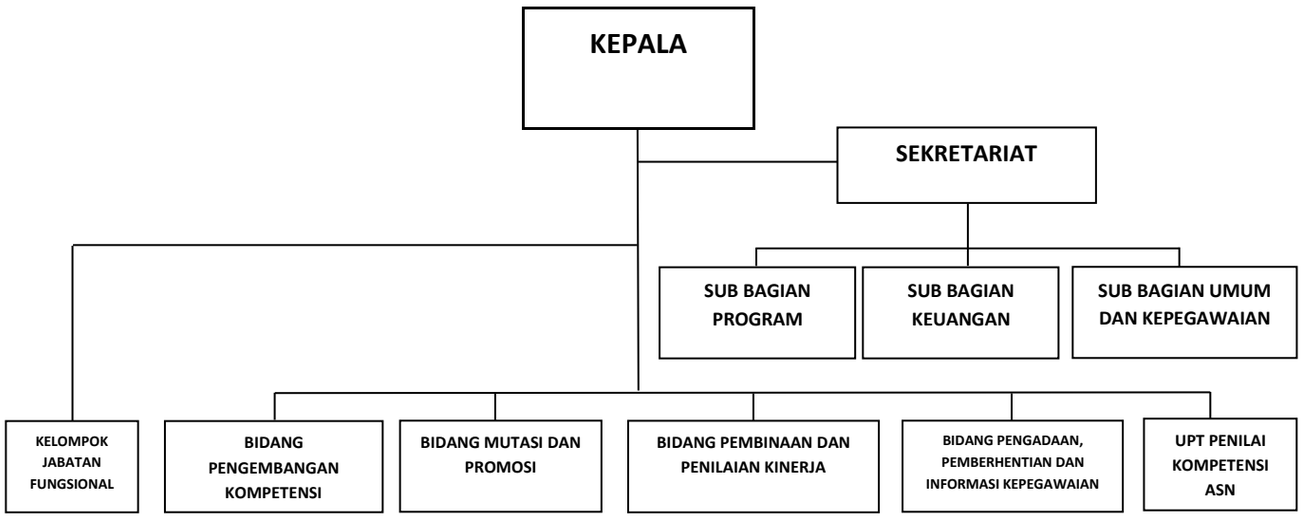

2.2. Sumber Daya BKD Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

BKD Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 1 UPT. Jumlah ASN BKD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 150 orang, secara detail akan disajikan sebagaimana tabel 2.1. s.d. tabel 2.3. di bawah ini :

Tabel 2. 1 Jumlah PNS BKD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
I	1	0	0
II	10	7	17
III	63	50	113
IV	16	4	20
JUMLAH	**89**	**61**	**150**

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah (September 2025)

Tabel 2. 2 Jumlah PNS BKD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
SD	2	0	2
SMP	0	0	0
SMA	12	0	12
D1	0	0	0
D2	0	0	0
Sarmud/DIII	1	10	11
D4	12	2	14
SM.Non Ak	0	0	0
SM.Ak	0	0	0
STRATA 1	30	31	61
STRATA 2	32	18	50
STRATA 3	0	0	0
JUMLAH	**89**	**61**	**150**

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah (September 2025)

Berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berpendidikan S2 sejumlah 50 orang, yang berpendidikan S1 sejumlah 61 orang, yang berpendidikan D4 sejumlah 14 orang, yang berpendidikan SMA sejumlah 12 orang, yang berpendidikan SMP sejumlah 0 orang dan yang berpendidikan pada tingkat SD sejumlah 2 orang.

Tabel 2. 3 Jumlah PNS BKD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
<20-40 Tahun	77
41 - 55 Tahun	62
> 55 Tahun	10
Jumlah	**150**

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah (September 2025)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum sumberdaya manusia yang dimiliki BKD Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh laki-laki dengan tingkat pendidikan strata 1 dan 2 serta dalam rentang usia muda <40 tahun, hal ini menjadikan BKD Provinsi Jawa Tengah perpotensi untuk dapat melakukan terobosan-

terobosan yang inovatif dan akselerasi dalam pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatannya.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

BKD Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang dan di Jl. Setiabudi No. 201 Srondol Semarang, sedangkan Sarana dan prasarana kerja (perlengkapan) yang masih dikelola dan tercatat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah kondisi Februari tahun 2025 terdiri:

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana BKD Provinsi Jawa Tengah

NO.	Sarana dan Prasarana	Jenis
1.	Bangunan dan Gedung Kantor sejumlah 10 unit	a. 5 unit berupa Kantor Induk dan bangunan penunjang b. 3 unit bangunan di kompleks BPSDMD Srondol c. 1 Unit Rumah Dinas d. 1 unit Taman Rumah Dinas
2.	Bangunan dan Gedung BKD Prov. Jateng di Jl. Stadion Selatan No 1 Semarang	a. Gedung kantor induk b. Bangunan Diesel c. Bangunan Koperasi dan Kantin d. Bangunan ATK e. Bangunan Gudang
3.	Bangunan dan Gedung Di Kompleks BPSDMD Srondol Jl. Setiabudi 201 A Semarang	a. Bangunan dokumentasi data b. Rumah genset c. Gedung TMMK
4.	Rumah Dinas Jl. Nangka Timur I No. 4 Semarang	a. 1 Rumah Dinas b. 1 unit Taman Rumah Dinas
5.	Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	18 unit
6.	Kendaraan Dinas roda 2 (dua)	10 unit
7.	Peralatan Kantor: a. Laptop b. Komputer c. Printer d. UPS e. LCD f. Sound system g. CCTV h. PABX i. Pesawat Telepon j. Air Conditioner (AC) k. Genset l. Rool Opec	 76 unit 329 unit 131 unit 189 unit 16 unit 6 unit 11 set 2 unit 41 buah 133 unit 3 unit 19 unit

Dari tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Gedung kantor sebanyak 2 tempat yaitu Kantor Induk di Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang dan di komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jl. Setiabudi No. 201 Srondol Semarang. Terbagi dari 5 bangunan gedung di Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang terdiri dari : a). Gedung Kantor Induk; b). Bangunan Diesel; c). Bangunan Koperasi dan Kantin; d). Bangunan ATK; e). Bangunan Gudang dan 3 unit bangunan di kompleks BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : a). Bangunan Gedung Dokumentasi Data; b). Rumah Genset; c). Gedung CAT.
2. Kendaraan dinas sebanyak 28 unit terdiri dari 18 kendaraan roda empat dan 10 kendaraan roda dua.
3. Peralatan kantor yang mendukung kinerja pelayanan kepegawaian terdiri : 96 unit laptop, 397 unit komputer, 147 unit printer, 237 unit UPS, 16 unit LCD, 5 unit sound system, 11 set unit CCTV, 2 unit PABX, 10 unit finger print, 41 buah pesawat telepon, 143 unit AC, 3 unit genset, dan 19 unit rool opec (lemari penyimpanan lactomapfolder).

Sarana dan prasaran yang dimiliki BKD Provinsi Jawa Tengah masih cukup memadai, namun untuk mengikuti perkembangan yang ada diperlukan perbaharuan terhadap beberapa sarana prasarana yang secara usia pemakaian sudah banyak mengalami penyusutan, antara lain kendaraan roda empat untuk operasional dengan usia lebih dari 15 tahun dan sarana prasarana IT mendukung pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian. Dan untuk pengembangan *Assesment Centre* diperlukan penyediaan sarana prasarana ruang *assessment* yang lebih memadai.

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Capaian kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah periode Renstra Tahun 2020-2024 dikelompokkan sesuai dengan cascading kinerja dapat dijelaskan dalam tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	Renstra PD Tahun 2018-2023																			
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN		√	√																
	Nilai Sistem Merit	Nilai				272	276	280	284		289	335.5	337.5	340,5		70.49%	81.83 %	82.32%	83,04%	
	Meninkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai				65	87,5	88	89		87,5	88	88,5	89,25		134,6	100	100,5	100,3	
2.	Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan		√	√																
	Persentase Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Pengembangan Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi																			
	Persentase Pengembangan Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai				65	87,5	88	89		87,5	88	88,5	89,25		134,6	100	100,5	100,3	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah																			
	Nilai SAKIP PD	Nilai				71	74,71	77	81		74,71	76,47	79,17	80,55		105,2	102,3	102,8	99,4	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah																			
	Persentase PNS Yang Terpetakan Kompetensinya (Sesuai Target Yang Ditetapkan 10.000 orang dalam 5 tahun)	%			√	40%	60%	80%	100%		40%	60%	80%	100%		40%	60%	80%	100%	
	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	√		√	40%	60%	80%	100%		40%	60%	80%	100%		40%	60%	80%	100%	
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%			√	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Persentase layanan administrasi kepegawaian	%	√		√	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Persentase penanganan kasus kepegawaian	%			√	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Persentase Sistem Informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	√		√	60%	80%	100%	20%		60%	80%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
B.	Renstra PD Tahun 2024-2026																			
1.	Mewujudkan Meritokrasi dalam Manajemen ASN																			
	Indeks Sistem Merit	Indeks								0,86					0,86					100%
	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah																			
	Indeks Refomasi Birokrasi	Indeks								80					85,36					106,7
2.	Terwujudnya Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan yang akurat dan akuntabel																			

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, dan Manajemen Kinerja	Nilai								355,5					355,5					100%
	Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi																			
	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi	Nilai								75,5					75,5					100%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan risiko Perangkat daerah																			
	Indeks Manajemen Risiko	Indeks								3					3					100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks								91					91					100%
3.	Program Kepegawaian Daerah																			
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan	%								100					100					100
	Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	%								100					100					100
	Persentase Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%								100					100					100
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%								100					100					100

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu	%								100					100					100
	Persentase Peningkatan pemahaman atas dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%								100					100					100
	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	%								100					100					100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					100

Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Periode Renstra Tahun 2018-2023, ketika Pandemi Covid-19 melanda di awal tahun 2020, sehingga kemudian fokus pemerintah diarahkan pada percepatan penanganan dengan merubah pola kerja dan tatanan kerja melalui digitalisasi layanan pemerintah dalam segala sektor. BKD Provinsi Jawa Tengah merespon cepat dengan inovasi dan transformasi digital layanan kepegawaian, sehingga seluruh layanan kepegawaian dilakukan tanpa tatap muka. Salah satu hasil kongkrit yaitu dengan pengembangan Aplikasi SINAGA, yaitu layanan kepegawaian berbasis smartphone, dimana seluruh layanan kepegawaian dapat diakses oleh masing-masing PNS dari perangkat *smartphone* masing-masing individu misalnya untuk layanan presensi ASN berbasis *geo tagging* dan f*ace recognize*.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka seluruh OPD wajib menyusun Renstra Tahun 2024-2026 sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, sehingga pada tahun tersebut BKD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kinerja pembangunan secara teknokratik.
3. Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan hasil penilaian mandiri dalam sistem merit dengan kategori **"Sangat Baik"**, dengan **Indeks 0,81**, dan hingga pada Tahun 2024 masih dapat mempertahankan predikat Sangat Baik tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi Manajemen ASN berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi.
4. Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan dalam Implementasi Manajemen Talenta ASN, Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dari *Talent Pool*, hal ini merupakan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan Sistem Merit dalam Kategori Sangat Baik sejak Tahun 2021.

Secara umum dalam beberapa tahun terakhir kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi Manajemen ASN dapat terlaksana dengan baik. Namun, dalam aspek kepegawaian

dinamika perubahan regulasi berjalan dengan sangat cepat dan dinamis, misalnya terkait dengan penyetaraan jabatan, penyelesaian tenaga non ASN dan pengangkatan PPPK yang harus disikapi dengan cepat dan sesuai dengan regulasi.

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah	46,173,665,000	86,341,207,000	58,108,639,000	47,519,256,000	44,638,997,000	43,153,249,828	84,120,845,732	53,169,077,457	46,243,530,892	43,916,280,847	93.46	97.43	91.50	97,32	98,38	-6.14	-11.29
Belanja Pegawai	24,267,779,000	69,925,469,000	34,953,199,000	23,713,880,000	24,926,076,000	23,323,784,511	68,570,484,310	31,416,604,484	23,288,718,212	24,558,237,394	96.11	98.06	89.88	98,21	98,52	-7.24	-15.95
Belanja Barang dan Jasa	20,597,539,000	15,687,738,000	21,994,240,000	22,558,224,000	19,415,262,000	18,613,570,137	14,843,362,722	20,652,988,999	21,763,407,680	19,060,385,003	90.37	94.62	93.90	96,48	98,17	-2.28	1.01
Belanja Modal	1,308,347,000	728,000,000	1,161,200,000	1,247,152,000	297,659,000	1,215,895,180	706,998,700	1,099,483,974	1,191,405,000	297,658,450	92.93	97.12	94.69	95,53	100	-20.39	-13.48
Total	46,173,665,000	86,341,207,000	58,108,639,000	84,071,430,000	44,638,997,000	43,153,249,828	84,120,845,732	53,169,077,457	46,243,530,892	43,916,280,847	93.46	97.43	91.50	97,32	98,38	-6.14	-11.29

Selama periode lima tahun dari 2020 hingga 2024, anggaran pendanaan pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, total anggaran merupakan anggaran yang tertinggi diantara lainnya, dikarenakan pada tahun sebelumnya dilakukan refocusing kemudian kembali normal pada Tahun 2021. Namun pada tahun berikutnya anggaran terus mengalami penurunan hingga menyentuh angka Rp 43,9 miliar di tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan anggaran menunjukkan tren negatif sebesar -6,14% per tahun, menandakan adanya penyesuaian atau efisiensi dalam perencanaan anggaran dari tahun ke tahun.

Dari sisi komponen belanja, belanja pegawai masih menjadi bagian terbesar dari total anggaran namun telah direncanakan dan dihitung dengan cukup presisi dengan rasio realisasi terhadap anggaran yang tinggi, konsisten berada di atas 96% setiap tahunnya, mencerminkan pelaksanaan yang cukup optimal. Sementara itu, belanja barang dan jasa mencatat rata-rata pertumbuhan realisasi positif sebesar 1,01%, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk kegiatan operasional. Rasio realisasi juga konsisten di atas 90%, memperlihatkan efisiensi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan alokasi anggaran pada setiap tahunnya, BKD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan performa pelaksanaan anggaran yang cukup baik. Hal ini terlihat dari rasio realisasi terhadap anggaran yang stabil dan tinggi, rata-rata di atas 93% selama lima tahun terakhir. Efisiensi ini menjadi indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun tren penurunan anggaran, namun BKD Provinsi Jawa Tengah dapat melaksanakan program kegiatannya dengan baik tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada Masyarakat dan dapat merealisasikan target-target yang telah direncanakan, salah satunya dengan digitalisasi manajemen kepegawaian.

2.4. Permasalahan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Dalam pembangunan daerah bidang kepegawaian khususnya dalam implementasi Manajemen ASN di Provinsi Jawa Tengah, identifikasi permasalahan akan disajikan pada tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Manajemen Talenta ASN belum berjalan sesuai kebutuhan	1. Perencanaan dan pengadaan ASN belum berjalan sesuai kebutuhan;	1. Kebijakan perencanaan dan pengadaan ASN sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi; 2. Kebijakan perencanaan dan pengadaan ASN yang berubah-ubah setiap

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			tahunnya; 3. Formasi yang disetujui tidak sama dengan yang diusulkan; 4. Distribusi ASN belum merata dan belum sepenuhnya mengisi formasi pada setiap perangkat daerah.
		2. Pengembangan Karier belum sesuai dengan kebutuhan	1. Belum tersedianya standar kompetensi pada seluruh level jabatan; 2. Kebijakan terkait implementasi pola karir yang sangat dinamis; 3. Pengembangan kompetensi belum berjalan sesuai dengan kebutuhan; 4. Penilaian potensi dan kompetensi belum dijadikan dasar utama dalam pengembangan karir.
		3. Pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan belum sepenuhnya mendukung arah kebijakan pembangunan daerah	1. Perubahan Kebijakan di Perguruan Tinggi terkait proses pendidikan Tugas Belajar ASN; 2. Tidak seluruh ASN Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu; 3. Dinamika Kebijakan Instansi Pembina Kepegawaian terkait ketentuan Pencantuman Gelar bagi ASN; 4. Pemanfaatan ASN pasca Tugas Belajar belum optimal.
		4. Belum terukurnya kinerja riil individu dalam mendukung kinerja organisasi	1. Penilaian kinerja individu belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja riil; 2. Kinerja individu belum terintegrasi dengan kinerja organisasi; 3. Belum tersedianya analisis kesenjangan kinerja. 4. Hasil penilaian kinerja belum dijadikan sebagai dasar pengembangan karir.
2	Layanan kepegawaian belum sesuai dengan kebutuhan	1. Belum seimbangnya penerapan reward and punishment ASN	1. Reward ASN belum diberikan secara adil dan layak; 2. Belum sepenuhnya mengakomodir kebijakan penghargaan finansial dan non finansial; 3. Tingginya angka pelanggaran disiplin dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kasus kepegawaian.
		2. Perlindungan ASN belum berjalan sesuai dengan regulasi	1. Lemahnya kebijakan perlindungan bagi ASN 2. Belum tersedianya layanan perlindungan ASN berbasis digital
		3. Layanan kepegawaian belum sepenuhnya berbasis *digital, online* dan terintegrasi.	1. Infrastruktur dan jaringan IT butuh peningkatan dan penyesuaian; 2. Belum tercukupinya *back up* data kepegawaian.
		4. Proses bisnis layanan kepegawaian bergantung pada instansi pusat.	1. Sebagian besar layanan kepegawaian bergantung pada proses bisnis dan prosedur dari Instansi pusat; 2. Layanan administrasi kepegawaian dapat berubah di tahun berjalan menyesuaikan dengan kebijakan instansi pusat.
		5. Data dan dokumen kepegawaian ASN yang belum sepenuhnya valid dan akurat	1. Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat dinamis khususnya terkait big data dan data analisis; 2. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi dalam Pengembangan Sistem dan SDM; 3. Proses Transformasi Pengelolaan dokumen fisik ke Digital belum berjalan maksimal

2.5. Isu Strategis BKD Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN yang efektif, efisien, dan akuntabel berbasis sistem merit, berdasarkan hasil evaluasi kondisi eksisting, hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, isu strategis lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang menjadi tantangan perangkat daerah kedepan yang bersumber dari sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, hasil penjaringan masukan stakeholder oleh perangkat daerah serta potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah, terdapat beberapa isu strategis di bidang kepegawaian yang perlu mendapat perhatian dalam periode perencanaan ke depan, dapat dijelaskan pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 2. 8 Perumusan Isu Strategis BKD Provinsi Jawa Tegah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Manajemen Talenta ASN belum berjalan sesuai kebutuhan	-	• Tingginya kebutuhan talenta unggul	• Peluang bonus demografi dan penyiapan talenta yang unggul • Ketimpangan Distribusi Talenta ASN • Belum berjalannya manajemen Talenta Nasional	• Kebutuhan talenta yang sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan daerah • Tingginya jumlah non ASN di Jawa Tengah	• Meskipun jumlah ASN relatif memadai, namun distribusi kompetensi dan kualifikasi pendidikan ASN belum merata. • Masih terdapat pegawai dengan keterampilan yang belum sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks. • Diperlukan peta jalan pengembangan kompetensi jalur pendidikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah • Belum tersedianya

						profil kompetensi untuk seluruh ASN yang disusun secara realtime ● Penilaian kinerja belum mampu memotret kinerja riil ASN dan belum dijadikan dasar dalam pengembangan karir ● Belum opimalnya implementasi manajemen talenta pada seluruh level dan jenis jabatan ASN.
	Layanan kepegawaian belum sesuai dengan kebutuhan	-	● Maraknya *cyber crime* dalam penerapan digitaalisasi pada instansi pemerintah	● Belum optimalnya digitalisasi manajemen ASN ● Infrastruktur digitalisasi manajemen ASN nasional belum terpadu	● Perlunya kebutuhan pendanaan yang tinggi dalam mendukung digitalisasi manajemen ASN	● Sistem informasi kepegawaian belum sepenuhnya terintegrasi dan diperbarui secara berkelanjutan. ● Tingkat akurasi, kelengkapan, dan keamanan data serta dokumen kepegawaian yang masih rendah. ● Belum seimbangnya reward and punishment bagi ASN

						• Perlu kesiapan secara matang baik infrastruktur, jaringan, securitas, SDM dan anggaran dalam Digitalisasi Manajemen ASN

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Tahun 2025-2029.

3.1. Tujuan dan Sasaran BKD Provinsi Jawa Tengah

3.1.1.Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung tujuan Reformasi Birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Selanjutnya BKD Provinsi Jawa Tengah mendukung salah satu indikator tujuan Reformasi Birokrasi yaitu Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, dengan harapan dapat menciptakan birokrasi netral dan mampu melayani kebutuhan publik serta bebas dari KKN.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan mengadopsi dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta tujuan Reformasi Birokrasi dalam hal ini sasaran yang terkait dengan bidang kepegawaian maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 2 (dua) tujuan 1. **“Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN”** dengan indikator tujuan Indeks Sistem Merit; 2. “**Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis”** dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

3.1.2.Sasaran

Adapun dalam rangka implementasi RPJMD 2025-2029, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan pembangunan bidang kepegawaian 5 (lima) tahun ke depan adalah **“Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN”**, sebagai wujud dari amanah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan 3 (tiga) Sasaran, yaitu : **1) Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN** dengan indikator sasaran Indeks NSPK, **2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat; **3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** dengan indikator sasaran Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah BKD Provinsi Jawa Tengah beserta indikatornya kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN		Indeks Sistem Merit	Indeks	0.83	0,86	0,865	0.87	0.875	0.88	0.885	0.89	0.89
		1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks NSPK	Nilai	91,88	92	92,5	93	93,5	94	94,5	95	95

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Kepegawaian Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	80	85	86	86.5	87	87.5	88	88.5	88.5
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	91	91.5	92	92.5	93	93.5	94	94
		2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko	Indeks Manajemen Risiko Perangkat	Angka	2.8	2.9	3	3.1	3.15	3.2	3.25	3.3	3.3

		perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Daerah										

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan BKD Provinsi Jawa Tengah

3.2.1.Strategi

Strategi BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan, beban kerja dengan mempertimbangkan ASN akan pensiun dalam tiga tahun;
2. Pengadaan ASN yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur pengadaan maupun mutasi dari instansi lain;
3. Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, pembentukan *talent pool* dan rencana suksesi;
4. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan persyaratan objektif lainnya;
5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya;
6. Penggajian, penghargaan dan dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku ASN;
7. Perlindungan ASN dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian;
8. Penyediaan sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian.

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan bidang kepegawaian diarahkan untuk mewujudkan Manajemen ASN yang profesional, berintegritas berdasarkan sistem merit agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Arah kebijakan BKD Provinsi Jawa Tengah mendasarkan kepada tujuan dan sasaran organisasi serta analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2 berikut ini :

VISI Gubernur Jawa Tengah yaitu **“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”** dengan Misi diantaranya :

1) Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manuasi yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.
2) Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan Berkelanjutan.
3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas.
4) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif.
5) Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya local, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan social serta hak asasi manusia yang berkeadilan.
6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Selanjutnya untuk mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, khususnya misi ke-3, BKD Provinsi Jawa Tengah merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.2. di bawah ini :

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun serta sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.	1. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka 5 (lima) tahun sesuai struktur organisasi, peta jabatan dan analisis jabatan dan beban kerja berasarkan nama jabatan, kelas jabatan, jumlah dan kebutuhannya dengan penetapan PPK dengan diarahkan kepada jenis jabatan-jabatan tertertu yang bersifat keahlian dan mendukung prioritas pembangunan daerah mendatang.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Penyediaan data kepegawaian yang diperbaharui secara lengkap dan real time sesuai jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi.
			3. Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam jangka 5 (lima) tahun sesuai jabatan, pangkat dan dan unit kerja.
			4. Penyusunan rencana pemenuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun, baik dari jalur pengadaan murni maupun dari jalur mutasi eksternal.
		2. Pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, PPPK dan juga dari PNS mutasi dari instansi lain.	1. Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan beserta payung hukumnya.
			2. Penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif dengan diarahkan kepada jenis jabatan-jabatan tertertu yang bersifat keahlian dan mendukung prioritas pembangunan daerah mendatang.
			3. Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar.
			4. Penyelesaian skema pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		3. Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, pembentukan *talent pool* dan rencana suksesi.	1. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi.
			2. Penyusunan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi dan hasil penilaian kinerja;
			3. Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang-kan pola karir instansi;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Penyusunan informasi tentang kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai;
			5. Penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN
			6. Peningkatan kompetensi melalui coaching, dan mentoring serta praktik kerja dan pertukaran pegawai;
			7. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal.
		4. Promosi dan mutasi secara obyektif, transparan dan akuntabel berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pola karir ASN;
			2. Pelaksanaan dan Penyediaan kebijakan tentang pengisian Jabatan Manajerial secara terbuka dan kompetitif serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;
		5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya	1. Penyediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi
			2. Pengembangan metode penilaian kinerja yang obyektif dan akuntabel
			3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja
			4. Penyediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir
		6. Perbaikan Penggajian, penghargaan dan penegakan disiplin, kode etik serta kode perilaku ASN.	1. Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan hasil kelas jabatan, penilaian kinerja dan aspek objektif lainnya
			2. Pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial kepada ASN yang berprestasi
			3. Pembinaan dan Penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian, penanganan kasus dan penjatuhan hukuman disiplin dan/atau pemberhentian terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin/kode etik kepegawaian
			4. Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN yang terintegrasi dengan data base kepegawaian lainnya
		7. Perlindungan dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian ASN	1. Memperluas kebijakan perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional)
			2. Penyediaan fasilitas yang memudahkan ASN dalam mendapatkan layanan administrasi kepegawaian.
		8. Penyediaan sistem informasi pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian	1. Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai
			2. Penerapan e-performance/e-kinerja yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis onlin

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian
			4. Pembangunan dan penggunaan asessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi

Selain itu, disajikan pentahapan pembangunan yang dimaksud untuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BKD Provinsi Jawa Tengah. Prioritas dalam setiap tahapan harus mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan sebelumnya. Pentahapan dimaksud disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 3 Pentahapan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah

Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Tata Kelola Manajemen ASN melalui : 1. Pemetaan Kebutuhan Jabatan berdasarkan Kompetensi dan Kinerja, 2. Peningkatan Kompetensi ASN, 3. Manajemen Talenta ASN, 4. Peningkatan kinerja dan disiplin ASN, 5. Restrukturisasi Sistem Informasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN melalui: 1. Peningkatan Kompetensi berbasis analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi serta Manajemen Talenta ASN, 2. Pengembangan Manajemen Kinerja dan Talenta disertai *reward and*	1. Peningkatan Penerapan Perlindungan dan Penegakan Disiplin yang Berkeadilan untuk Menjamin Kesejahteraan ASN yang didukung dengan Penguatan Manajemen Kinerja dan Talenta, 2. Peningkatan Kompetensi ASN berbasis *Human Capital Development*	1. Penumbuhan Daya Saing ASN melalui Mekanisme Mutasi dan Promosi yang berbasis Manajemen Talenta dan Kompetensi berdasarkan Manajemen Kinerja, Kompetensi dan Integritas, 2. Peningkatan Kompetensi ASN berbasis *Human Capital Development*	Mewujudkan SMART ASN yang berwawasan global dan berintegritas yang didukung sistem Sistem Informasi kepegawaian terintegrasi yang berbasis Meritokrasi.

layanan kepegawaian, 6. Peningkatan Akurasi Data Kepegawaian	*punishment* yang berkeadilan 3. Penyediaan Profil ASN berbasis kompetensi, 4. Penguatan Sistem Informasi kepegawaian menuju single base data kepegawaian.	*Plan (HCDP),* 3. Penyempurnaan Manajemen Talenta, sistem manajemen kinerja ASN terintegrasi, 4. Optimalisasi Sistem Informasi layanan kepegawaian, dan 5. Implementasi *reward and punishment* yang layak dan berkeadilan	*Plan (HCDP)* dan integritas ASN, 3. Sistem karir yang handal, didukung sistem Sistem Informasi kepegawaian terintegrasi	

Dalam tabel tersebut diatas dapat dilihat relevansi dan konsistensi antara tujuan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN, mampu mendukung perwujudan *Human Capital* ASN yang berdaya saing.

3.3. Manajemen Risiko BKD Provinsi Jawa Tengah

Manajemen risiko dalam dalam konteks Renstra adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah. Selanjutnya Proses manajemen risiko BKD Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan PD	Indikator Kinerja PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
MEWUJUDKAN MERITOKRASI DALAM MANAJEMEN ASN	Indeks Sistem Merit	Terdapat unsur kepentingan dalam pengisian jabatan	12	Penetapan dalam pengisian jabatan merupakan kewenangan dari Gubernur selaku PPK	Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan turun	Penguatan Regulasi berdasarkan Sistem Merit	Kepala BKD	2025-2029
		Terdapat pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan	12	Keterbatasan kader suksesi yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan	Kinerja organisasi kurang maksimal	Pelaksanaan Talent Scouting dan Pemenuhan data base kuadran 9 untuk memperoleh kader suksesi	Kepala BKD	2025-2029
		Ketidaksesuaian Formasi dengan Kebutuhan	12	kurang koordinasi antar unit	Terdapat Guru yang tidak mendapatkan jam mengajar	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperbarui Anjab-ABK	Kepala BKD	2025-2029
		Kebijakan Penerimaan CASN tiap tahun bersifat tentatif	12	Kebijakan penerimaan CASN bergantung pada Instansi Pusat	Formasi tidak terpenuhi	Berkoordinasi dengan Instansi Pusat	Kepala BKD	2025-2029

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah

BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, memiliki 2 (dua) program, dengan jumlah kegiatan sebanyak 18 kegiatan dan 76 Sub Kegiatan. Yang merupakan program strategis hanya 1 (satu) yaitu Program Kepegawaian Daerah sedangkan 1 (satu) program yang lain merupakan program operasional atau penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan 17 Sub Kegiatan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 18 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan.

Detail Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah dapat disajikan dalam tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Mewujudkan Manajemen ASN Berdasarkan Meritokrasi *												8,200,520,000		8,304,800,000		9,304,800,000		9,304,800,000		9,304,800,000	Badan Kepegawaian Daerah	
							Indeks Sistem Merit *	Angka	0.86	0.865	0.87		0.875		0.88		0.885		0.89		Badan Kepegawaian Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN **											8,200,520,000		8,304,800,000		9,304,800,000		9,304,800,000		9,304,800,000	Badan Kepegawaian Daerah	
							Indeks NSPK Manajemen ASN **	Angka	92	92.5	93	8,200,520,000	93.5	8,304,800,000	94	9,304,800,000	94.5	9,304,800,000	95	9,304,800,000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH ***									1,021,000,000		1,021,000,000		1,021,000,000		1,021,000,000		1,021,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terpetakannya kompetensi ASN	Persentase pemetaan kompetensi ASN ***	%	100	100	100	1,021,000,000	100	1,021,000,000	100	1,021,000,000	100	1,021,000,000	100	1,021,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN ****								1,021,000,000		1,021,000,000		1,021,000,000		1,021,000,000		1,021,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Terlaksananya penilaian kompetensi ASN	Persentase ASN yang dinilai kompetensinya ****	%	100	100	100	791,000,000	100	791,000,000	100	791,000,000	100	791,000,000	100	791,000,000	POKJA PENILAIAN KOMPETENSI	
		5.03.02.1.03.0002			Pengelolaan Assessment Center *****							1,582,000,000		1,582,000,000		1,582,000,000		1,582,000,000		1,582,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center *****	Dokumen	N/A	1000	11250	791,000,000	11250	791,000,000	11250	791,000,000	11250	791,000,000	11250	791,000,000	POKJA PENILAIAN KOMPETENSI	JAWA TENGAH Unit Penilaian Kompet

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																						ensi ASN Kelas A
						Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN ****	%	100	100	100	230,000,000	100	230,000,000	100	230,000,000	100	230,000,000	100	230,000,000	POKJA PERENCANAAN DAN EVALUASI	
		5.03.02.1.03.0002			Pengelolaan Assessment Center *****							460,000,000		460,000,000		460,000,000		460,000,000		460,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kompetensi ASN *****	Dokumen	N/A	2	2	230,000,000	2	230,000,000	2	230,000,000	2	230,000,000	2	230,000,000	POKJA PERENCANAAN DAN EVALUASI	JAWA TENGAH Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH ***									2,626,000,000		2,651,000,000		3,651,000,000		3,651,000,000		3,651,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN ***	%	N/A	70	85	2,626,000,000	100	2,651,000,000	100	3,651,000,000	100	3,651,000,000	100	3,651,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi	
		5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN ****								2,626,000,000		2,651,000,000		3,651,000,000		3,651,000,000		3,651,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi	
						Terpenuhinya ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan lanjutan	Persentase ASN yang menempuh pendidikan lanjutan hasil verifikasi ****	%	100	100	100	2,256,000,000	100	2,256,000,000	100	3,256,000,000	100	3,256,000,000	100	3,256,000,000	Pokja Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
		5.03.02.1.03.0004			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN *****							2,256,000,000		2,256,000,000		3,256,000,000		3,256,000,000		3,256,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola *****	Dokumen	N/A	150	150	2,256,000,000	150	2,256,000,000	150	3,256,000,000	150	3,256,000,000	150	3,256,000,000	Pokja Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	JAWA TENGAH
						Terlaksanya pengisian Jabatan Fungsional ASN sesuai kebutuhan	Persentase Keterisian Jabatan Fungsional ASN ****	%	100	100	100	370,000,000	100	395,000,000	100	395,000,000	100	395,000,000	100	395,000,000	Pokja Pengembangan Jabatan Fungsional	
		5.03.02.1.03.0014			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional *****							320,000,000		320,000,000		320,000,000		320,000,000		320,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi	
						Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsion	Dokumen	N/A	1500	1500	320,000,000	1500	320,000,000	1500	320,000,000	1500	320,000,000	1500	320,000,000	Pokja Pengembangan Jabatan Fungsional	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							al *****															
		5.03.02.1.03.0015			Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional *****							50,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi	
						Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional *****	Laporan	N/A	2	2	50,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	Pokja Pengembangan Jabatan Fungsional	JAWA TENGAH
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH ***									1,090,000,000		1,215,000,000		1,215,000,000		1,215,000,000		1,215,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi	
						Terpenuhinya Jabatan ASN sesuai dengan Manajemen Talenta	Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta ***	%	N/A	90	92	1,090,000,000	94	1,215,000,000	96	1,215,000,000	98	1,215,000,000	100	1,215,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		5.03.02.1.02		Mutasi dan Promosi ASN ****								1,090,000,000		1,215,000,000		1,215,000,000		1,215,000,000		1,215,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi	
						Keterisian Jabatan ASN melalui mekanisme mutasi dan promosi	Persentase Keterisian Jabatan ASN melalui mekanisme mutasi & promosi ****	%	N/A	90	92	775,000,000	94	900,000,000	96	900,000,000	98	900,000,000	100	900,000,000	Pokja Mutasi dan Promosi ASN	
		5.03.02.1.02.0001			Pengelolaan Mutasi ASN *****							375,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi	
						Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi	Dokumen	N/A	2	2	375,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	Pokja Mutasi dan Promosi ASN	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	ASN Antar Daerah *****																
		5.03.02.1.02.0003			Pengelolaan Promosi ASN *****							400,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi	
						Terlaksanany Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN *****	Dokumen	N/A	2	2	400,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	Pokja Mutasi dan Promosi ASN	Bidang Mutasi dan Promosi JAWA TENGAH
						Terfasilitasinya kenaikan pangkat ASN tepat waktu	Persentase Kenaikan Pangkat ASN tepat Waktu ****	%	100	100	100	315,000,000	100	315,000,000	100	315,000,000	100	315,000,000	100	315,000,000	Pokja Kenaikan Pangkat ASN dan Layanan Adminstrasi Kepegawaian	
		5.03.02.1.02.0002			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN *****							315,000,000		315,000,000		315,000,000		315,000,000		315,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN *****	Laporan	10000	10000	10000	315,000,000	10000	315,000,000	10000	315,000,000	10000	315,000,000	10000	315,000,000	Pokja Kenaikan Pangkat ASN dan Layanan Adminstrasi Kepegawaian	JAWA TENGAH
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH ***									1,120,000,000		1,102,800,000		1,102,800,000		1,102,800,000		1,102,800,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
						Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN ***	%	N/A	10	10	845,000,000	10	852,800,000	10	852,800,000	10	852,800,000	10	852,800,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
		5.03.02.1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ****								845,000,000		852,800,000		852,800,000		852,800,000		852,800,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kesejahteraan ASN	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ****	%	100	100	100	385,000,000	100	392,800,000	100	392,800,000	100	392,800,000	100	392,800,000	Pokja Kesejahteraan ASN	
		5.03.02.1.04.0004			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai *****							292,800,000		292,800,000		292,800,000		292,800,000		292,800,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
						Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan *****	Orang	N/A	200	200	292,800,000	200	292,800,000	200	292,800,000	200	292,800,000	200	292,800,000	Pokja Kesejahteraan ASN	JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0005			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai *****							92,200,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
						Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa *****	Orang	N/A	1000	1000	92,200,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	Pokja Kesejahteraan ASN	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan disiplin ASN	Persentase pembinaan disiplin ASN ****	%	N/A	10	20	460,000,000	40	460,000,000	60	460,000,000	80	460,000,000	100	460,000,000	Pokja Pembinaan Disiplin Pegawai	
		5.03.02.1.04.0007			Pembinaan Disiplin ASN *****							180,000,000		180,000,000		180,000,000		180,000,000		180,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
						Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan *****	Orang	N/A	7000	15000	180,000,000	25000	180,000,000	30000	180,000,000	35000	180,000,000	45000	180,000,000	Pokja Pembinaan Disiplin Pegawai	JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0008			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN *****							280,000,000		280,000,000		280,000,000		280,000,000		280,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Kinerja	
						Terlaksanya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN *****	Laporan	N/A	4	5	280,000,000	5	280,000,000	5	280,000,000	5	280,000,000	5	280,000,000	Pokja Pembinaan Disiplin Pegawai	JAWA TENGAH
						Meningkatnya kinerja ASN	Persentase peningkatan kinerja ASN ***	%	N/A	80	85	275,000,000	87.5	250,000,000	90	250,000,000	92.5	250,000,000	95	250,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
		5.03.02.1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ****								275,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Penilaian Kinerja	
						Terfasilitasinya penilaian dan evaluasi kinerja ASN secara periodik	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya ****	%	100	100	100	275,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	Pokja Penilaian Kinerja	
		5.03.02.1.04.0002			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur *****							275,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
						Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur *****	Dokumen	5	5	5	275,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	Pokja Penilaian Kinerja	Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja JAWA TENGAH
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH ***									2,343,520,000		2,315,000,000		2,315,000,000		2,315,000,000		2,315,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Kepegawaian	
						Terpenuhinya kebutuhan ASN sesuai formasi	Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi ***	%	100	100	100	1,600,000,000	100	1,455,000,000	100	1,455,000,000	100	1,455,000,000	100	1,455,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
		5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN ****								1,600,000,000		1,455,000,000		1,455,000,000		1,455,000,000		1,455,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
						Terselenggaranya pengadaan ASN	Persentase pelaksanaan seleksi pengadaan CASN sesuai formasi ****	%	100	100	100	1,600,000,000	100	1,455,000,000	100	1,455,000,000	100	1,455,000,000	100	1,455,000,000	Pokja Pengadaan dan Pemberhentian ASN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		5.03.02.1.01.0002			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN *****							60,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
						Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN *****	Dokumen	1	1	1	60,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	Pokja Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
		5.03.02.1.01.0003			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK *****							1,260,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK *****	Dokumen	1	1	1	1,260,000,000	1	1,100,000,000	1	1,100,000,000	1	1,100,000,000	1	1,100,000,000	Pokja Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
		5.03.02.1.01.0006			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian *****							280,000,000		280,000,000		280,000,000		280,000,000		280,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
						Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian *****	Dokumen	2275	2100	1979	280,000,000	1995	280,000,000	1935	280,000,000	1924	280,000,000	1975	280,000,000	Pokja Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN ***	%	N/A	50	70	743,520,000	80	860,000,000	90	860,000,000	100	860,000,000	100	860,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
		5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN ****								743,520,000		860,000,000		860,000,000		860,000,000		860,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
						Meningkatnya validitas data kepegawaian ASN	Persentase Data kepegawaian yang tervalidasi ****	%	N/A	50	70	385,000,000	80	385,000,000	90	385,000,000	100	385,000,000	100	385,000,000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		5.03.02.1.01.0010			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian *****							385,000,000		385,000,000		385,000,000		385,000,000		385,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
						Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	1	1	385,000,000	1	385,000,000	1	385,000,000	1	385,000,000	1	385,000,000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	JAWA TENGAH
						Meningkatnya validitas dokumen kepegawaian ASN	Persentase Dokumen kepegawaian yang tervalidasi ****	%	N/A	50	70	358,520,000	80	475,000,000	90	475,000,000	100	475,000,000	100	475,000,000	Pokja Pengelolaan Data, Dokumen Kepegawaian dan Korps Profesi ASN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		5.03.02.1.01.0008			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN *****							175,000,000		225,000,000		225,000,000		225,000,000		225,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
						Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi *****	Lembaga	1	1	1	175,000,000	1	225,000,000	1	225,000,000	1	225,000,000	1	225,000,000	Pokja Pengelolaan Data, Dokumen Kepegawaian dan Korps Profesi ASN	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian JAWA TENGAH
		5.03.02.1.01.0011			Pengelolaan Data Kepegawaian *****							183,520,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian *****	Dokumen	1	1	1	183,520,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	Pokja Pengelolaan Data, Dokumen Kepegawaian dan Korps Profesi ASN	JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Kepegawaian Daerah *												33,543,109,000		33,587,376,000		34,390,103,000		34,795,839,000		35,570,747,000	Badan Kepegawaian Daerah	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah *	Angka	85	86	86.5		87		87.5		88		88.5		Badan Kepegawaian Daerah	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan											550,000,000		550,000,000		550,000,000		550,000,000		550,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kepegawaian Daerah **																					
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah **	Angka	2.9	3	3.1	550,000,000	3.15	550,000,000	3.2	550,000,000	3.25	550,000,000	3.3	550,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									550,000,000		550,000,000		550,000,000		550,000,000		550,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah ***	%	100	100	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								550,000,000		550,000,000		550,000,000		550,000,000		550,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	18	18	18	250,000,000	18	250,000,000	18	250,000,000	18	250,000,000	18	250,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksanaanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	23	23	23	250,000,000	23	250,000,000	23	250,000,000	23	250,000,000	23	250,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksanaanya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	Badan Kepegawaian Daerah
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	Badan Kepegawaian Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah **											32,993,109,000		33,037,376,000		33,840,103,000		34,245,839,000		35,020,747,000	Badan Kepegawaian Daerah	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah **	Angka	91	91.5	92	32,993,109,000	92.5	33,037,376,000	93	33,840,103,000	93.5	34,245,839,000	94	35,020,747,000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									32,933,109,000		32,596,211,000		33,425,103,000		33,830,839,000		34,605,747,000	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah ***	%	100	100	100	32,933,109,000	100	32,596,211,000	100	33,425,103,000	100	33,830,839,000	100	34,605,747,000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								27,695,143,000		27,848,245,000		28,677,137,000		28,782,873,000		29,857,781,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	14	14	14	27,695,143,000	14	27,848,245,000	14	28,677,137,000	14	28,782,873,000	14	29,857,781,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							26,801,955,000		26,951,955,000		27,780,847,000		27,886,583,000		28,961,491,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/ Bulan	150	150	150	26,801,955,000	150	26,951,955,000	150	27,780,847,000	150	27,886,583,000	150	28,961,491,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							801,290,000		801,290,000		801,290,000		801,290,000		801,290,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	801,290,000	12	801,290,000	12	801,290,000	12	801,290,000	12	801,290,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD *****							50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	7	7	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****							20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	1	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							21,898,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	4	4	4	21,898,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersediannya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.X.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ****								20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Meningkatnya pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ****	Laporan	2	2	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.X.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****							20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	2	2	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								220,000,000		170,000,000		170,000,000		170,000,000		170,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	220,000,000	100	170,000,000	100	170,000,000	100	170,000,000	100	170,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	200	N/A	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							190,000,000		140,000,000		140,000,000		140,000,000		140,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	30	30	30	190,000,000	30	140,000,000	30	140,000,000	30	140,000,000	30	140,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****							30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	140	140	140	30,000,000	140	30,000,000	140	30,000,000	140	30,000,000	140	30,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								1,285,966,000		1,305,966,000		1,305,966,000		1,305,966,000		1,305,966,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	1,285,966,000	100	1,305,966,000	100	1,305,966,000	100	1,305,966,000	100	1,305,966,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							140,000,000		140,000,000		140,000,000		140,000,000		140,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	2	140,000,000	2	140,000,000	2	140,000,000	2	140,000,000	2	140,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							25,966,000		25,966,000		25,966,000		25,966,000		25,966,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	25,966,000	1	25,966,000	1	25,966,000	1	25,966,000	1	25,966,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	2	2	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	N/A	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							150,000,000		185,000,000		185,000,000		185,000,000		185,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	150,000,000	12	185,000,000	12	185,000,000	12	185,000,000	12	185,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							125,000,000		110,000,000		110,000,000		110,000,000		110,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	12	12	12	125,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								780,000,000		280,000,000		280,000,000		580,000,000		280,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	5	5	5	780,000,000	5	280,000,000	5	280,000,000	5	580,000,000	5	280,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							500,000,000		0		0		300,000,000		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	2	500,000,000	N/A	0	N/A	0	N/A	300,000,000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersediannya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka	Unit	6	6	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							n *****															
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								2,062,000,000		2,112,000,000		2,112,000,000		2,112,000,000		2,112,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	12	2,062,000,000	12	2,112,000,000	12	2,112,000,000	12	2,112,000,000	12	2,112,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							12,000,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							700,000,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	700,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1,300,000,000		1,350,000,000		1,350,000,000		1,350,000,000		1,350,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	1,300,000,000	12	1,350,000,000	12	1,350,000,000	12	1,350,000,000	12	1,350,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								720,000,000		710,000,000		710,000,000		710,000,000		710,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	27	27	27	720,000,000	27	710,000,000	27	710,000,000	27	710,000,000	27	710,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					*****																	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	27	27	27	200,000,000	27	200,000,000	27	200,000,000	27	200,000,000	27	200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Dinas Operasional atau Lapangan	dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****															
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							30,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	30,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.0 1.1.09. 0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi *****	Unit	12	12	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.0 1.1.09. 0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	2	2	2	190,000,000	2	190,000,000	2	190,000,000	2	190,000,000	2	190,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									60,000,000		441,165,000		415,000,000		415,000,000		415,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Unit Penilaian Kompetensi ASN	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN ***	%	100	100	100	60,000,000	100	441,165,000	100	415,000,000	100	415,000,000	100	415,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								60,000,000		140,000,000		140,000,000		140,000,000		140,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	N/A	N/A	60,000,000	N/A	140,000,000	N/A	140,000,000	N/A	140,000,000	N/A	140,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.00001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							0		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.06.00002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		12,000,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	12,000,000	N/A	12,000,000	N/A	12,000,000	N/A	12,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
		X.XX.01.1.06.00003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							0		8,000,000		8,000,000		8,000,000		8,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	8,000,000	N/A	8,000,000	N/A	8,000,000	N/A	8,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							0		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	15,000,000	N/A	15,000,000	N/A	15,000,000	N/A	15,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							0		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.06.00006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	5,000,000	N/A	5,000,000	N/A	5,000,000	N/A	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
		X.XX.01.1.06.00008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							0		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	20,000,000	N/A	20,000,000	N/A	20,000,000	N/A	20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.00009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								0		155,000,000		155,000,000		155,000,000		155,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	155,000,000	N/A	155,000,000	N/A	155,000,000	N/A	155,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							0		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	5,000,000	N/A	5,000,000	N/A	5,000,000	N/A	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							0		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	150,000,000	N/A	150,000,000	N/A	150,000,000	N/A	150,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								0		146,165,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	146,165,000	N/A	120,000,000	N/A	120,000,000	N/A	120,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.00002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,							0		36,165,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompete	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****																nsi ASN Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	36,165,000	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							0		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	50,000,000	N/A	50,000,000	N/A	50,000,000	N/A	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna							0		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					n Lainnya *****																	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	50,000,000	N/A	50,000,000	N/A	50,000,000	N/A	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

Tabel 4. 2 Sub Kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1.	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan Kompetensi Jalur Pendidikan Formal ASN untuk melaksanakan tugas belajar dibiayai APBD dengan perhitungan pagu disesuaikan dengan inflasi biaya pendidikan	2025 : 18 Orang 2026 : 18 Orang 2027 : 18 Orang 2028 : 18 Orang 2029 : 18 Orang 2030 : 18 Orang	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Bidang Pengembangan Kompetensi	Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Peningkatan Kompetensi Jalur Pendidikan Formal dengan persiapan beasiswa luar negeri melalui Tugas Belajar dan LPDP Preparation Program	6 Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Bidang Pengembangan Kompetensi	Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kesejahteraan ASN	2027 : 1 Pergub	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	TAPD (Inspektorat, BPKAD, Bappeda, Biro Hukum, Biro Organisasi)
2.	Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa	Penataan SDM Aparatur Pengawasan untuk Penguatan APIP	2025 : 12 Orang 2026 : 12 Orang 2027 : 9 Orang 2028 : 6 Orang 2029 : 3 Orang	1. Pengelolaan Mutasi ASN 2. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1. Bidang Mutasi Promosi 2. Bidang Pengembangan Kompetensi	Biro Organisasi dan Inspektorat

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan ditunjukkan dengan progres pencapaian target indikator kinerja di dalam Renstra yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program kerja dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 melalui upaya perwujudan tujuan dan sasaran BKD Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, telah disusun indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKD Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada.

Indikator kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tergambar dalam tabel 4.3 yang bersumber dari tabel 4.1.

Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN		Indeks Sistem Merit	0.83	0.86	0.865	0.87	0.875	0.88	0.885	0.89	
		Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks NSPK	91.88	92	92.5	93	93.5	94	94.5	95	
2.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	86	86.5	87	87.5	88	88.5	
		1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	90	91	91.5	92	92.5	93	93.5	94	

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	2.8	2.9	3	3.1	3.15	3.2	3.25	3.3	

BAB V
PENUTUP

Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan BKD Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini telah melalui proses diantaranya identifikasi permasalahan dan perumusan isu strategis, FGD internal dan eksternal, Forum Perangkat Daerah, FGD dengan Kabupaten/Kota, serta verifikasi akhir dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Saran dan masukan tetap diharapkan untuk perbaikan Renstra ke depan, sehingga manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saja, namun juga aparatur pemerintah Kabupaten/Kota, stakeholder terkait dan masyarakat selaku penerima pelayanan publik.

Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama 5 (lima) tahun kedepan serta dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Seluruh bidang dan Sekretariat BKD Provinsi Jawa Tengah berkewajiban mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. BKD Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029, BKD Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang dan Sekretariat yang ada diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
3. Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung RKPD Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai fokus kegiatan yang akan dilakukan BKD Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2025-2029 antara lain :

1. Optimalisasi redistribusi ASN sesuai dengan jabatan;
2. Pencanangan program peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan di luar negeri;
3. Penilaian potensi dan kompetensi secara reguler berbasis sistem informasi;
4. Penguatan implementasi Manajemen Talenta ASN;
5. Penguatan dan digitaliasi data base kompetensi dan kinerja ASN;
6. Implementasi penilaian kinerja ASN untuk mendukung kinerja organisasi dan sebagai dasar dalam pengembangan karir;
7. Peningkatan kualitas sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian terintegrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan, tanggungjawab serta kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Jawa Tengah untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra ini guna mendukung tercapainya Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih periode 2025-2030 yaitu **“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”.**

POHON KINERJA BKD PROVINSI JAWA TENGAH 2025 - 2029

MEWUJUDKAN MERITOKRASI DALAM MANAJEMEN ASN

MENINGKATNYA KUALITAS MANAJEMEN ASN

- Meningkatnya kesesuaian perencanaan pengadaan pegawai dengan kebutuhan
  - Meningkatnya sinergi kebijakan perencanaan pengadaan ASN antara provinsi dan pusat
  - Meningkatnya kesesuaian formasi CASN dengan kebutuhan organisasi
  - Meningkatnya keselarasan kebijakan perencanaan pengadaan ASN dengan pemerintah pusat
- Terlaksananya penerapan manajemen talenta ASN secara obyektif dan akuntabel
  - Meningkatnya penerapan standar kompetensi pada seluruh level jabatan
    - Meningkatnya pemenuhan hak ASN dalam pengembangan kompetensi
  - Meningkatnya kepastian dan transparansi pola karir ASN
    - Meningkatnya pemetaan dan tindak lanjut atas analisis kesenjangan kompetensi ASN
  - Meningkatnya pengembangan karir ASN berbasis penilaian potensi dan kompetensi
    - Meningkatnya kompetensi ASN melalui jalur pendidikan formal
  - Meningkatnya kesesuaian pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi
    - Meningkatnya pemanfaatan peta pengembangan kompetensi ASN dalam perencanaan SDM
- Meningkatnya pengukuran kinerja riil individu untuk mendukung kinerja organisasi
  - Terukurnya kinerja riil individu sebagai dasar penilaian kinerja
  - Meningkatnya keterpaduan antara kinerja individu dan kinerja organisasi
  - Meningkatnya penggunaan analisis kesenjangan kinerja untuk perbaikan organisasi
- Meningkatnya keselarasan proses bisnis layanan kepegawaian dengan instansi pusat
  - Meningkatnya integrasi layanan administrasi kepegawaian dengan instansi pusat
- Terlaksananya sistem reward and punishment ASN secara seimbang
  - Terimplementasinya sistem penghargaan finansial dan non finansial bagi ASN
  - Menurunnya angka pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian ASN
- Meningkatnya kepastian dan transparansi pola karir ASN
  - Terjaminnya perlindungan ASN sesuai regulasi
  - Meningkatnya kepatuhan ASN terhadap nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas
- Meningkatnya integrasi layanan administrasi kepegawaian dengan instansi pusat
  - Meningkatnya kualitas infrastruktur, jaringan, dan keamanan sistem kepegawaian
  - Terjaminnya ketersediaan dan keamanan database kepegawaian melalui sistem back up
  - Terwujudnya single data kepegawaian yang valid dan terintegrasi

CASCADE 2025-2029
BKD PROVINSI JAWA TENGAH

MEWUJUDKAN MERITOKRASI DALAM MANAJEMEN ASN

IK :Indeks Sistem Merit

Meningkatnya kualitas Manajemen ASN

IK : Indeks NSPK Manajemen ASN
Formulasi : Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Program Kepegawaian Daerah

Meningkatnya Kompetensi ASN

IK : Persentase Peningkatan pengembangan kompetensi ASN
Formulasi : Jumlah dokumen HCDP yang ditetapkan + Jumlah dokumen HCDP yang disusun x 100% (progress positif)

Kelompok Kerja Pendidikan Lanjutan ASN

Pengembangan Kompetensi ASN

Terpenuhinya ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan lanjutan

IK : Persentase ASN yang menempuh pendidikan lanjutan hasil verifikasi
Formulasi :
Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan dari hasil verifikasi dibagi Jumlah ASN yang direncanakan x 100% (pengulangan)

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Fasilitasi Pendidikan lanjutan ASN

Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola

Kelompok Kerja Pengembangan Jabatan Fungsional

Pengembangan Kompetensi ASN

Terlaksananya pengisian jabatan fungsional ASN sesuai kebutuhan

IK : Persentase keterisian jabatan fungsional ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Formulasi :
Jumlah Jabatan Fungsional ASN yang ditetapkan + Jumlah Jabatan Fungsional ASN yang direncanakan x 100% (pengulangan)

Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional

UPENKOM

Program Kepegawaian Daerah

Tersedianya data kompetensi ASN

IK : Persentase penyediaan data kompetensi ASN
Formulasi : Jumlah data kompetensi ASN yang diinlai dibagi data kompetensi ASN yang direncanakan x 100% (pengulangan)

Kelompok Kerja Penilaian Kompetensi ASN

Pengembangan Kompetensi ASN

Terlaksananya penilaian kompetensi ASN

IK : Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi ASN
Formulasi : Jumlah ASN yang dinilai kompetensi dibagi Jumlah ASN yang direncanakan x 100% (pengulangan)

Pengelolaan Assesment Center

Tersusunnya dokumen hasil penilaian kompetensi yang dikelola

Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center

Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi

Pengembangan Kompetensi ASN

Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN

IK : Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN
Formulasi : Jumlah perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN dibagi Jumlah pelaksanaan penilaian kompetensi x 100% (pengulangan)

Pengelolaan Assesment Center

Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN

Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI ASN

Program Kepegawaian Daerah

Terpenuhinya Jabatan ASN sesuai dengan Manajemen Talenta

IK : Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta
Formulasi : Jumlah ASN yang diakuisisi, diretensi dan ditempatkan + Jumlah Jabatan ASN x 100%

Kelompok Kerja Mutasi dan Promosi ASN

Mutasi dan Promosi ASN

Ketersian Jabatan ASN melalui mekanisme mutasi & promosi

IK : Persentase Keterisian Jabatan ASN melalui mekanisme mutasi & promosi
Formulasi : Jumlah ASN yang mutasi & promosi + Jumlah formasi x 100 % (pengulangan)

Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksanaan dan Mutasi antar daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan mutasi Jabatan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi antar daerah

BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Program Kepegawaian Daerah

Terpenuhinya kebutuhan ASN sesuai formasi

IK : Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi
Formulasi : Jumlah ASN yang ditempatkan + formasi x 100 % (pengulangan)

Kelompok Kerja Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian

Mutasi dan Promosi ASN

Terfasilitasinya kenaikan pangkat ASN tepat waktu

IK : Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu
Formulasi : Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang ditetapkan + Jumlah SK yang diusulkan x 100 % (pengulangan)

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat ASN

Kelompok Kerja Pengadaan dan Pemberhentian ASN

Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian

Terselenggaranya pengadaan ASN

IK : Persentase pelaksanaan seleksi pengadaan CASN sesuai formasi
Formulasi : Jumlah CASN yang ditetapkan menjadi ASN + Jumlah hasil seleksi pengadaan x 100 % (pengulangan)

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Jumlah dokumen hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian

BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Program Kepegawaian Daerah

Meningkatnya akurasi data kepegawaian ASN

IK : Persentase peningkatan akurasi data kepegawaian ASN
Formulasi : Jumlah data ASN yang akurat dibagi jumlah seluruh data dan dokumen ASN dikali 100% (progress positif)

Kelompok Kerja Dokumentasi Data Kepegawaian dan Korps Profesi ASN dan Kelompok Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian

Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian

Meningkatnya akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN

IK: Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN
Formulasi : Jumlah data dan dokumen ASN yang akurat + jumlah seluruh data dan dokumen ASN x 100% (progress positif)

Pengelolaan Data Kepegawaian	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Terkelolanya Data Kepegawaian	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

BIDANG PEMBINAAN DAN PENILAIAN KINERJA

Program Kepegawaian Daerah

Meningkatnya kinerja ASN

IK : Persentase peningkatan kinerja ASN
Formulasi : Jumlah ASN yang berkinerja baik dikurangi jumlah ASN yang berkinerja buruk + Jumlah ASN x 100% (progress positif)

Kelompok Kerja Penilaian Kinerja

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Terfasilitasinya penilaian dan evaluasi kinerja ASN secara periodik

IK : Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya
Formulasi : Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya + Jumlah ASN secara keseluruhan x 100 % (pengulangan)

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Program Kepegawaian Daerah

Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan ASN

IK : Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN
Formulasi : Jumlah pelanggaran disiplin ASN + jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun sebelumnya

Kelompok Kerja Kesejahteraan ASN

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Meningkatnya kesejahteraan ASN

IK : Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa
Formulasi : Jumlah ASN yang menerima pemberian penghargaan dan tanda jasa + Jumlah ASN yang direncanakan x 100 % (pengulangan)

Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN
Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa

Kelompok Kerja Pen

Penilaian dan Evalua

Meningkatnya pengelolaan

IK : Persentase pemb

Formulasi : Jumlah ASN yang mer
jumlah seluruh ASN x 10

Pembinaan Disiplin ASN

Meningkatnya disiplin ASN

Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan

dikali 100% (progress positif)
bimaan Disiplin ASN
oi Kinerja Aparatur
an pembinaan disiplin ASN
naan disiplin ASN
dapatkan pembinaan disiplin
0 % (progress positif)
bimaan Disiplin ASN
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

a. Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	Kebijakan pengelolaan kepegawaian yang dinamis	Risiko Kebijakan	Kebijakan pengelolaan kepegawaian bergantung pada Instansi Pusat	terjadinya gejolak di masyarakat	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran Program	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemetaan kompetensi AS	adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan	Risiko Fraud	kepentingan pribadi	hasil dan proses penilaian tidak objektif	Pemerintah provinsi Jawa Tengah
3	Sasaran Program	Program Kepegawaian Daerah	Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	Hasil pengembangan kompetensi belum sepenuhnya dimanfaatkan	Risiko Operasional	Pengembangan kompetensi belum dijadikan prioritas	Pengembangan kompetensi belum berdampak pada peningkatan kinerja dan karir	Pemerintah provinsi Jawa Tengah
4	Sasaran Program	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	Terdapat unsur kepentingan dalam pengisian jabatan	Risiko Fraud	Penetapan dalam pengisian jabatan merupakan kewenangan dari Gubernur selaku PPK	Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan turun	Pemerintah provinsi Jawa Tengah
5	Sasaran Program	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	Intervensi dari pihak yang berkepentingan	Risiko Fraud	Hubungan kekerabatan/kedekatan/afiliasi	Penjatuhan hukuman disiplin kurang objektif	Pemerintah provinsi Jawa Tengah
6	Sasaran Program	Program Kepegawaian Daerah	Persentase peningkatan kinerja ASN	hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan dalam pengembangan karir	Risiko Operasional	Belum menggambarkan kondisi real ASN	tools pengembangan karir tidak lengkap	Pemerintah provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
7	Sasaran Program	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	Ketidaksesuaian Formasi dengan Kebutuhan	Risiko Operasional	kurang koordinasi antar unit	Terdapat Guru yang tidak mendapatkan jam mengajar	Pemerintah provinsi Jawa Tengah
8	Sasaran Program	Program Kepegawaian Daerah	Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	Terhambatnya layanan kepegawaian	Risiko Operasional	Disparitas data dan dokumen kepegawaian	Pengambilan keputusan dilaksanakan secara tidak tepat	ASN Pemerintah provinsi Jawa Tengah
11	Sasaran Kegiatan	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN	Soal CAT Potensi bocor	Risiko Operasional	Bank soal kurang bervariasi	Hasil Tes CAT Potensi bias	Pemerintah provinsi Jawa Tengah
12	Sasaran Kegiatan	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang dinilai kompetensinya	Permohonan fasilitasi Penilaian Kompetensi dan Potensi PNS fluktuatif	Risiko Operasional	Permohonan Fasilitasi Penilaian Kompetensi dan Potensi bergantung pada kebijakan masing-masing PPK	Alokasi Sumber Daya yang disiapkan tidak optimal	BKD Provinsi Jawa Tengah
13	Sasaran Kegiatan	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Keterisian Jabatan Fungsional ASN	keterlambatan dalam pelantikan jabatan fungsional	Risiko Kebijakan	persetujuan formasi jabatan dari Menpan RB	terhambatnya karir pejabat fungsional	Pemerintah provinsi Jawa Tengah
14	Sasaran Kegiatan	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang menempuh pendidikan lanjutan hasil verifikasi	Keterlambatan dalam penyelesian pendidikan lanjutan melalui tugas belajar	Risiko Operasional	faktor kesehatan dan keluarga	kekosongan jabatan	Pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Perguruan Tinggi Negeri

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
15	Sasaran Kegiatan	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Keterisian Jabatan ASN melalui mekanisme mutasi & promosi	Terdapat pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan	Risiko Operasional	Keterbatasan kader suksesi yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan	Kinerja organisasi kurang maksimal	Pemerintah provinsi Jawa Tengah
16	Sasaran Kegiatan	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Kenaikan Pangkat ASN tepat Waktu	adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan dalam proses kenaikan pangkat ASN	Risiko Fraud	Hubungan kekerabatan	Proses Kenaikan Pangkat tidak objektif	Pemerintah provinsi Jawa Tengah
17	Sasaran Kegiatan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa	Hasil ujikes tidak sesuai dengan administrasi kepegawaian	Risiko Kemitraan	Hasil Uji Kesehatan tidak sesuai kondisi Pasien	Kerugian Negara karena ASN masih menerima penggajian	Pemerintah provinsi Jawa Tengah
18	Sasaran Kegiatan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	Keterlambatan dalam proses penilaian kinerja	Risiko Operasional	Ketidakpedulian ASN terkait batas waktu penilaian kinerja	Pemotongan TPP ASN	ASN Pemerintah provinsi Jawa Tengah
19	Sasaran Kegiatan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan disiplin ASN	Pembinaan disiplin tidak dilaksanakan	Risiko Operasional	Atasan langsung kurang peduli	Meningkatnya kasus pelanggaran disiplin	Pemerintah provinsi Jawa Tengah
20	Sasaran Kegiatan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan seleksi pengadaan	Kebijakan Penerimaan CASN tiap tahun bersifat tentatif	Risiko Kebijakan	Kebijakan penerimaan CASN bergantung pada Instansi Pusat	Formasi tidak terpenuhi	Pemerintah provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
			CASN sesuai formasi					
21	Sasaran Kegiatan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Data kepegawaian yang tervalidasi	Penyajian data tidak akurat	Risiko Operasional	peremajaan data tidak sesuai	terhambatnya layanan kepegawaian	Pemerintah provinsi Jawa Tengah
22	Sasaran Kegiatan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Dokumen kepegawaian yang tervalidasi	Penyajian dokumen tidak akurat	Risiko Operasional	peremajaan dokumen tidak sesuai	terhambatnya layanan kepegawaian	Pemerintah provinsi Jawa Tengah

b. Analisis Risiko

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kebijakan pengelolaan kepegawaian yang dinamis	3	4	12	ada	Penyesuaian regulasi sesuai dengan kebijakan Instansi Pusat	Belum memadai	3	4	12
2	adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan	2	4	12	ada	Akreditasi lembaga penilaian kompetensi	memadai	1	4	4
3	Hasil pengembangan kompetensi belum sepenuhnya dimanfaatkan	3	3	9	ada	Sosialisasi	memadai	2	3	6

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Terdapat unsur kepentingan dalam pengisian jabatan	4	4	16		Pengisian Jabatan berdasarkan Talent Pool (Kader Suksesi) menggunakan mekanisme manajemen talenta	memadai	3	4	12
5	Intervensi dari pihak yang berkepentingan	3	3			Sosilalisasi dan Pembinaan	Belum memadai	3	3	
6	hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan dalam pengembangan karir	3	3	9		penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan penilaian kinerja	Belum memadai	3	2	6
7	Ketidaksesuaian Formasi dengan Kebutuhan	3	4	12	ada	Perencanaan kebutuhan ASN melalui analisis jabatan & beban kerja (Anjab–ABK);	Belum Memadai	3	4	12
8	Terhambatnya layanan kepegawaian	3	3	9	ada	Sosialisasi dan pendampingan secara intens kepada Operator di OPD	Memadai	3	2	6
11	Soal CAT Potensi bocor	2	3	6	ada	pengembangan soal CAT	Memadai	2	2	4
12	Permohonan fasilitasi Penilaian Kompetensi	2	3	6	ada	Melakukan Penjadwalan	Memadai	2	2	4

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Potensi PNS fluktuatif					fasilitasi dan penyusunan Proposal layanan Upenkom				
13	keterlambatan dalam pelantikan jabatan fungsional	3	3	9	ada	Sosialisasi Jabatan Fungsional	Memadai	2	3	6
14	Keterlambatan dalam penyelesian pendidikan lanjutan melalui tugas belajar	3	3	9	ada	Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar	Memadai	2	3	6
15	Terdapat pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan	4	4	16	ada	Pemenuhan kader suksesi sesuai dengan sistem merit	Memadai	3	4	12
16	adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan dalam proses kenaikan pangkat ASN	3	4	12	ada	Sosialisasi terkait proses kenaikan pangkat secara intens	Memadai	2	4	8
17	Hasil ujikes tidak sesuai dengan administrasi kepegawaian	2	3	6	ada	Koordinasi dengan Instansi terkait	Memadai	2	3	6
18	Keterlambatan dalam proses penilaian kinerja	3	3	9	ada	Melakukan sosialisasi terkait pengelolaan	Memadai	2	3	6

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kinerja di setiap awal periode (awal tahun)				
19	Pembinaan disiplin tidak dilaksanakan	3	3	9	ada	Sosilalisasi dan Pembinaan	Memadai	2	3	6
20	Kebijakan Penerimaan CASN tiap tahun bersifat tentatif	4	4	12	ada	Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pusat terkait Seleksi Penerimaan CASN	Memadai	3	4	12
21	Penyajian data tidak akurat	3	3	9	ada	1. Pemantauan dan peremajaan data secara berkala dan sesuai kebutuhan 2. Koordinasi dengan instansi vertikan dan horizontal guna memastikan layanan kepegawaian berjalan dengan baik 3. Koordinasi dengan	Memadai	2	3	6

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pengampu infrastruktur dan pengamanan jaringan guna memastikan server dan sistem informasi terjami dari segi keamanan dan kehandalan				
22	Penyajian dokumen tidak akurat	3	3	9	ada	1. Pemantauan dan peremajaan dokumen secara berkala dan sesuai kebutuhan 2. Koordinasi dengan instansi vertikan dan horizontal guna memastikan layanan kepegawaian berjalan dengan baik 3. Koordinasi dengan pengampu	Memadai	2	3	6

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						infrastruktur dan pengamanan jaringan guna memastikan server dan sistem informasi terjami dari segi keamanan dan kehandalan				

c. Penetapan Risiko Prioritas

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemlik Risiko	Sebab	Dampak
	1	2	3	4	5
1	Terdapat unsur kepentingan dalam pengisian jabatan	12	Kepala BKD	Penetapan dalam pengisian jabatan merupakan kewenangan dari Gubernur selaku PPK	Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan turun
2	Terdapat pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan	12	Kepala BKD	Keterbatasan kader suksesi yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan	Kinerja organisasi kurang maksimal
3	Ketidaksesuaian Formasi dengan Kebutuhan	12	Kepala BKD	kurang koordinasi antar unit	Terdapat Guru yang tidak mendapatkan jam mengajar
4	Kebijakan Penerimaan CASN tiap tahun bersifat tentatif	12	Kepala BKD	Kebijakan penerimaan CASN bergantung pada Instansi Pusat	Formasi tidak terpenuhi

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan PD	Indikator Kinerja PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
MEWUJUDKAN MERITOKRASI DALAM MANAJEMEN ASN	Indeks Sistem Merit	Terdapat unsur kepentingan dalam pengisian jabatan	12	Penetapan dalam pengisian jabatan merupakan kewenangan dari Gubernur selaku PPK	Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan turun	Penguatan Regulasi berdasarkan Sistem Merit	Kepala BKD	2025-2029
		Terdapat pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan	12	Keterbatasan kader suksesi yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan	Kinerja organisasi kurang maksimal	Pelaksanaan Talent Scouting dan Pemenuhan data base kuadran 9 untuk memperoleh kader suksesi	Kepala BKD	2025-2029
		Ketidaksesuaian Formasi dengan Kebutuhan	12	kurang koordinasi antar unit	Terdapat Guru yang tidak mendapatkan jam mengajar	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperbarui Anjab-ABK	Kepala BKD	2025-2029
		Kebijakan Penerimaan CASN tiap tahun bersifat tentatif	12	Kebijakan penerimaan CASN bergantung pada Instansi Pusat	Formasi tidak terpenuhi	Berkoordinasi dengan Instansi Pusat	Kepala BKD	2025-2029

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I :
PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing. Perencanaan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan untuk mencapai keseimbangan, sehingga setiap kegiatan yang ada di dalamnya merupakan usaha yang memiliki titik fokus dalam keseimbangan, baik *problem solving, future oriented* maupun *resource allocation*. Secara umum, setiap proses perencanaan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: tahap awal/inisiasi, tahap substantif, tahap implementasi serta tahap pengendalian dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut akan memberikan kontribusi peran yang saling berkaitan dengan proses lainnya.

Komponen penting dalam manajemen strategis adalah perencanaan strategis dimana suatu proses penetuaan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategis-strategis alternatif serta penetapan tujuan jangka panjang. Penerapan strategis lebih menitik beratkan pada penetapan tujuan tahunan, membuat kebijakan, motivasi dan alokasi sumber daya agar strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan. Adapun penilaian strategis merupakan proses evaluasi apakah strategi yang dirumuskan dapat berjalan dengan baik sehingga merupakan bagian telaah yang memberikan informasi untuk perencanaan selanjutnya. Rencana Stategis merupakan proses perencanaan yang mencakup tujuh bagian yang saling berkaitan, yaitu :

1. Penilaian terhadap organisasi melalui SWOT.
2. Perumusan misi organisasi.
3. Perumusan falsafah dan kebijakan organisasi.
4. Penetapan sasaran- sasaran stategi.
5. Penetapan strategi organisasi.
6. Implementasi strategi organisasi.
7. Pengendalian dan evaluasi strategi organisasi.

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, terlihat suatu upaya pemerintah dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan menetapkan ketentuan umum mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan peraturan perundang - undangan tersebut maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan pengembangan kompetensi pegawai dan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan pelatihan juga berkewajiban pula untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka menengah sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dan bersifat indikatif. Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 ini kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta sebagai alat ukur realisasi kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah sebagian terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodifikasi dan menklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5);
t. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 ditetapkan dengan **maksud** :

a. Sebagai arah pembangunan jangka menengah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2025 – 2029.
b. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.
c. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan program Gubernur.
d. Penjabaran atas RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah :

a. Mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.
b. Menjadikan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
c. Meningkatkan kompetensi pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
e. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Neraca, Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan proyeksi keuangan daerah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan jangka menengah, dinamika yang muncul, serta isu strategis yang perlu dilaksanakan.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang visi dan misi, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode 2025 - 2029.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mecapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan arah kebijakan disusun pertahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya. Selanjutnya dijabarkan pula Program Prioritas berdasarkan strategi yang telah dirumuskan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Kerangka pendanaan menjelaskan tentnag Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta alternatif pendanaan pembangunan lainnya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastuktur publik. Program perangkat daerah berisi muatan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun, yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan melalui indikator kinerja utama.

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keberadaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perrasturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan fungsi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 68 tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dicabut sebagian ketentuannya oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas **"membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah"**.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia ASN;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia, sub sertifikasi dan penjaminan

mutu, pengembangan kompetensi teknis, jabatan fungsional, dan manajerial.

Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, adalah :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, palaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Sekretariat membawahkan:

- Subbagian Program;
- Subbagian Keuangan; dan
- Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Sertifikasi dan Penjaminan Mutu

bidang sertifikasi kompetensi dan penjaminan mutu mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sertifikasi kompetensi, pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi, dan pengendalian mutu dan kerjasama.

Bidang Sertifikasi dan Penjaminan Mutu membawahkan:

- Kelompok Kerja Sertifikasi Kompetensi;
- Kelompok Kerja Pengembangan Perangkat Pembelajaran & Tenaga Pengembangan Kompetensi; dan
- Kelompok Kerja Pengendalian Mutu & kerja sama.

d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, Dan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan.

Bidang pengembangan Kompetensi Teknis membawahkan:

- Kelompok Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
- Kelompok Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Inti; dan
- Kelompok Kerja Pengembangan Kompetensi Pilihan.

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelatihan pembentukan jabatan fungsional, pelatihan penjenjangan jabatan fungsional, dan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional.

Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional membawahkan:

- Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional rumpun 1 (satu);
- Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional rumpun 2 (diua); dan
- Kelompok Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional rumpun 3 (tiga).

f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri mempunyai tugas mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah, Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator dan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan.

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri membawahkan :

- Kelompok Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- Kelompok Kerja Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator; dan
- Kelompok Kerja Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan.

Disamping itu, pengembangan kompetensi ASN khususnya di Provinsi Jawa Tengah, tidak lepas dari peran Widyaiswara sebagai tenaga pengembang kompetensi. Wisdyaiswara sebagai ujung tombak dalam pengembangan kompetensi memiliki tugas dan tanggung jawab, serta wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih ASN pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. Data terkait

Widyaiswara di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara sejumlah 53 orang.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

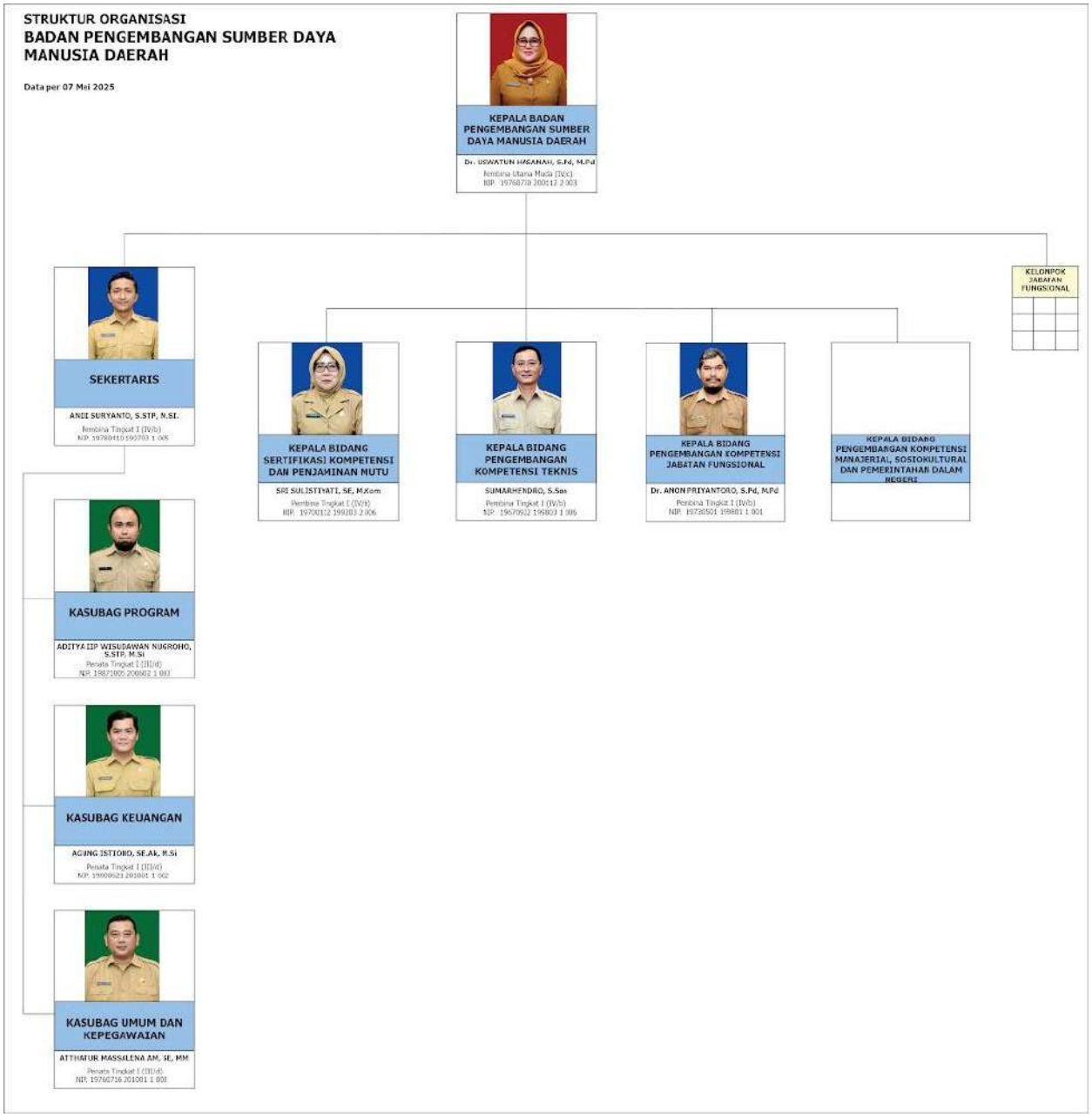

Gambar 2.2
Diagram Jumlah Widyawiswara Berdasarkan Jabatan

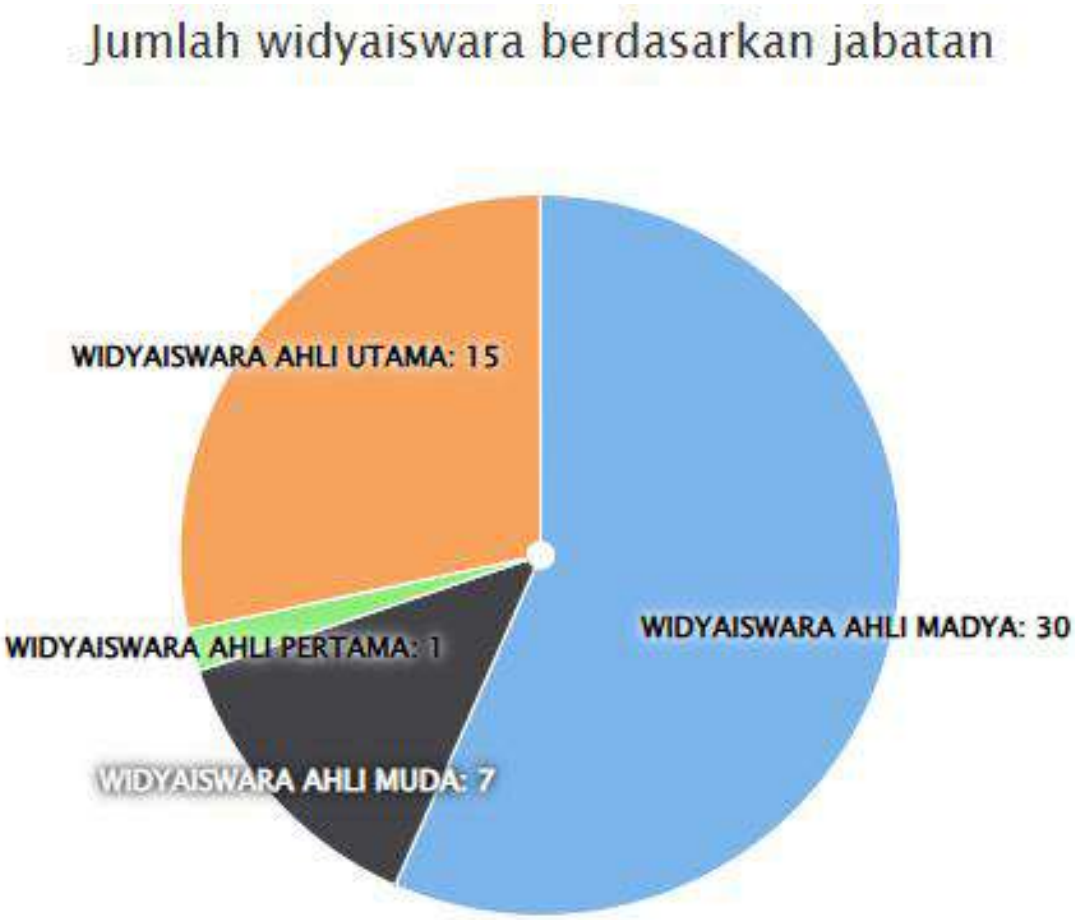

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, mengatur tentang susunan organisasi yang dalam hal ini terkait dengan jumlah pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi. Data terkait dengan jumlah sumber daya manusia di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sampai dengan awal tahun 2025, terdapat 273 orang pegawai dengan penjelasan secara lebih rinci pada gambar berikut :

Gambar 2.3
Jumlah Sumber Daya Manusia BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
Per 3 September 2025

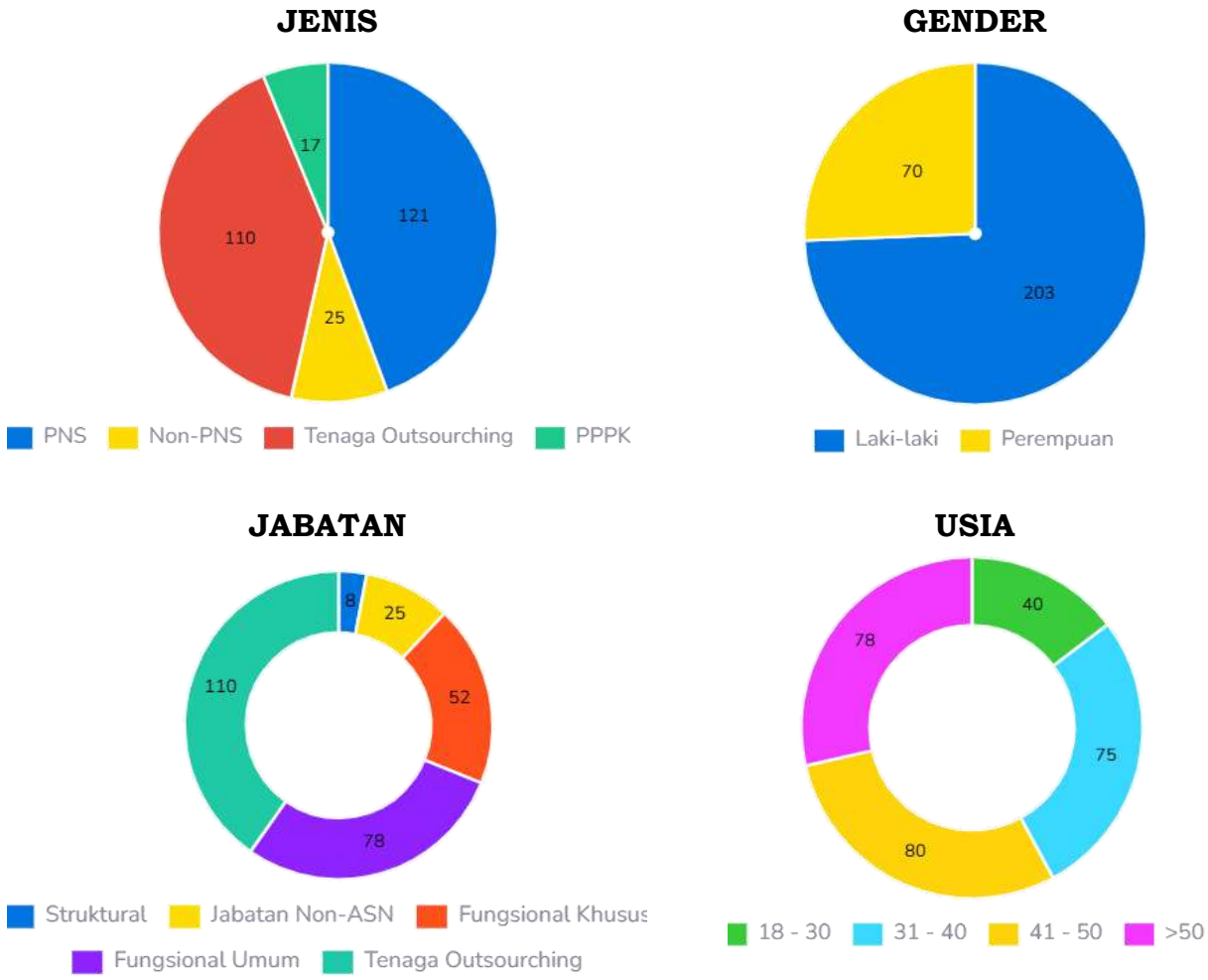

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya berada di Kota Semarang, tepatnya di Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan

Banyumanik. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berdiri diatas lahan seluas 21 hektar dengan kondisi kontur tanah memiliki kemiringan.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah didukung dengan adanya sarana dan prasarana serta fasilitas yang dapat menunjang penyelenggaraan kegiatan dalam pelatihan. Fasilitas yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi prasarana utama, prasarana pendukung, dan sarana pendukung.

Penjelasan detail terkait dengan bangunan/gedung asrama, ruang kelas, dan aula yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan disajikan melalui tabel berikut :

PRASARANA UTAMA

Tabel 2.2.1
GEDUNG AULA

NO	URAIAN RUANG	JUMLAH	KAPASITAS
1.	Balai SASANA WIDYA PRAJA	1 Unit	500 Orang
2.	Aula MURIA	1 Unit	300 Orang
JUMLAH		**2 Unit**	**800 Orang**

Tabel 2.2.2
GEDUNG PENDIDIKAN/PRASARANA PEMBELAJARAN

NO	URAIAN RUANG	JUMLAH	KAPASITAS
A.	**EKSEKUTIF MERAPI**		
1.	Ruang Kelas	1 Unit	100 Orang
2.	Ruang Diskusi	6 Unit	90 Orang
3.	Ruang Transit Widyaiswara	1 Unit	
4.	Ruang Kesehatan	1 Unit	
5.	Sekretariat Panitia	1 Unit	
JUMLAH			**190 Orang**
B.	**GEDUNG PENDIDIKAN SINDORO**		
1.	Ruang Kelas Lantai 1	4 Unit	160 Orang
2.	Ruang Kelas Lantai 2	4 Unit	240 Orang
3.	Ruang Transit Widyaiswara	1 Unit	
4.	Sekretariat Panitia	1 Unit	
JUMLAH			**400 Orang**
C.	**GEDUNG PENDIDIKAN MERBABU**		
1.	Ruang Kelas Lantai 1	2 Unit	80 Orang
2.	Ruang Kelas Lantai 2	8 Unit	240 Orang
3.	Ruang Diskusi Lantai 1	2 Unit	80 Orang
4.	Sekretariat Panitia	1 Unit	
JUMLAH			**400 Orang**
D.	**GEDUNG PENDIDIKAN MURIA**		
1.	Ruang Kelas Muria I	1 Unit	40 Orang
2.	Ruang Kelas Muria II	1 Unit	40 Orang
JUMLAH			**80 Orang**
E.	**GEDUNG PENDIDIKAN SUMBING I**		
1.	Ruang Kelas Lantai 1	4 Unit	160 Orang
2.	Ruang Kelas Lantai 2	4 Unit	160 Orang
3.	Ruang Transit Widyaiswara	2 Unit	
4.	Sekretariat Panitia	2 Unit	
JUMLAH			**320 Orang**
F.	**GEDUNG PENDIDIKAN SUMBING II**		
1.	Ruang Kelas Lantai 1	2 Unit	80 Orang
2.	Ruang Seminar (Hall)	1 Unit	150 Orang
3.	Ruang Transit Widyaiswara	1 Unit	
4.	Sekretariat Penitia	1 Unit	
JUMLAH			**230 Orang**

Tabel 2.2.3
GEDUNG ASRAMA

NO	URAIAN RUANG	JUMLAH	KAPASITAS
A.	**ASRAMA SINDORO I**		
1.	Lantai 1	9 Kamar	36 Orang
2.	Lantai 2	21 Kamar	42 Orang
3.	Lantai 3	21 Kamar	42 Orang
JUMLAH			**120 Orang**
B.	**ASRAMA SINDORO II**		
1.	Lantai 1	6 Kamar	12 Orang
2.	Lantai 2	25 Kamar	100 Orang
3.	Lantai 3	25 Kamar	100 Orang
JUMLAH			**112 Orang**
C.	**ASRAMA SINDORO III**		
1.	Lantai 1	9 Kamar	18 Orang
2.	Lantai 2	21 Kamar	42 Orang
3.	Lantai 3	21 Kamar	44 Orang
JUMLAH			**104 Orang**
D.	**ASRAMA MURIA I**		
1.	Lantai 1	14 Kamar	28 Orang
2.	Lantai 2	8 Kamar	16 Orang
JUMLAH			**44 Orang**
E.	**ASRAMA MURIA II**		
1.	Lantai 1	16 Kamar	32 Orang
JUMLAH			**32 Orang**
F.	**ASRAMA SUMBING I**		
1.	Lantai 1	9 Kamar	18 Orang
2.	Lantai 2	8 Kamar	16 Orang
JUMLAH			**34 Orang**
G.	**ASRAMA SUMBING II**		
1.	Lantai 1	12 Kamar	48 Orang
2.	Lantai 2	12 Kamar	48 Orang
JUMLAH			**96 Orang**
H.	**ASRAMA SUMBING III**		
1.	Lantai 1	16 Kamar	64 Orang
2.	Lantai 2	17 Kamar	68 Orang
JUMLAH			**132 Orang**
I.	**ASRAMA SUMBING IV**		
1.	Lantai 1	11 Kamar	22 Orang
2.	Lantai 2	12 Kamar	24 Orang
JUMLAH			**46 Orang**
E.	**ASRAMA EKSEKUTIF MERAPI**		
1.	Lantai 1	21 Kamar	42 Orang
2.	Lantai 2	29 Kamar	58 Orang
JUMLAH			**100 Orang**

Tabel 2.2.4
GEDUNG MENZA/RUANG MAKAN

NO	URAIAN RUANG	JUMLAH	KAPASITAS
1.	Ruang Makan Eksekutif Merapi	1 Unit	110 Orang
2.	Menza Sindoro	1 Unit	300 Orang
3.	Menza Muria	1 Unit	80 Orang
4.	Menza Sumbing	1 Unit	300 Orang
JUMLAH			**790 Orang**

Tabel 2.2.5
PRASARANA PENDUKUNG

NO	URAIAN	JUMLAH	KAPASITAS
1.	Ruang Kantor	1 Unit	300 Orang
2.	Laboratorium Bahasa	1 Unit	20 Orang
3.	Laboratorium Komputer	1 Unit	40 Orang
4.	Laboratorium Perkantoran	1 Unit	40 Orang
5.	Rumah Dinas Pimpinan	1 Unit	-
6.	Wisma Tenaga Kediklatan	1 Unit	-
7.	Perpustakaan	1 Unit	-
8.	Sarana Olahraga		
	- Lapangan Sepak Bola	1 Unit	-
	- Lapangan Tenis	2 Unit	-
	- Lapangan Voli	1 Unit	-
	- Meja Billiard	1 Unit	-
	- Fitness Center	1 Unit	10 Orang
	- Outbond Area	1 Unit	-
	- Fasilitas Sepeda	6 Unit	-
9.	Fasilitas Rekreasi		
	- Kebun Koleksi Satwa	1 Unit	-
10.	Koperasi	1 Unit	-
11.	Poliklinik	1 Unit	-
12.	Tempat Ibadah / Masjid	1 Unit	-
13.	Laundry Center	1 Unit	-
14.	Genset	6 Unit	-
15.	Pos Keamanan	4 Unit	-
16.	Kantin	1 Unit	25 Orang
17.	Kendaraan Dinas		
	Bus Non AC	1 Unit	25 Orang
	Ambulance	1 Unit	-

	Station Wagon	10 Unit	-
	Sepeda Motor	12 Unit	-
	Mobil Operasional Pick Up	1 Unit	-
	Kendaraan Roda Tiga	2 Unit	-

Tabel 2.2.6
SARANA PENDUKUNG

NO	URAIAN RUANG	JUMLAH
1.	Papan Tulis	38 Unit
2.	Flip Chart	74 Unit
3.	Sarana Multimedia	
	- Wireless Presentation System (WPS)	20 Unit
	- Interactive White Board (IWB)	5 Unit
	- TV Plasma / LCD	280 Unit
	- Sound System	10 Unit
	- CD / DVD Player	10 Unit
	- Audio Recorder	4 Unit
	- Video Recorder	4 Unit
	- Kamera Digital	20 Unit
4.	Komputer	180 Unit
5.	Laptop / Notebook	70 Unit
6.	LCD Projector	50 Unit
7.	Jaringan Wifi / Internet	2 Unit
8.	CCTV	20 Unit
9.	Buku Referensi	4.000 Unit
10.	Modul / Bahan Ajar	100 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Untuk mengukur sebagaimana kinerja, maka diperlukan ukuran-ukuran yang dapat menggambarkan keberhasilan dari kinerja itu sendiri atau dinamakan dengan Indikator. Indikator dapat berupa Indikator Keluaran (Output) yang merupakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan Tujuan Program dan Kebijakan. Selain itu, terdapat juga Indikator Hasil (Outcome) yang merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu Program. Selain kedua Indikator tersebut, terdapat juga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, dan merupakan Ikhitisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi

organisasi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melalui Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 menegaskan bahwa faktor kunci yang pertama dalam mengembangkan kompetensi adalah cakupan pelaksanaan/penyelenggaraan pelatihan itu sendiri. Sejauh mana penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur setiap tahunnya melalui Pelatihan Teknis, Fungsional, Kepemimpinan, Pemerintah Daerah, maupun Pelatihan Dasar CPNS dan Prajabatan. Faktor kunci kedua dalam pengembangan kompetensi adalah bagaimana kualitas pelatihan itu sendiri sesuai dengan standar mutu pelaksanaan, serta alumni pelatihan yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan instansi/organisasi pengguna (user).

Dalam mewujudkan kinerja, tentunya membutuhkan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut dapat berupa manusia, peralatan atau sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki, bahan atau perlengkapan lain yang dapat menunjang pencapaian kinerja, serta ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dengan adanya biaya/anggaran untuk menujudkan pencapaian kinerja tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus efektif dan efisien agar kinerja yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dengan kata lain, pemenuhan kinerja harus diimbangi dengan perencanaan, penggunaan dan pengelolaan anggaran yang baik. Anggaran yang digunakan haruslah sebanding dengan realisasi kinerja yang dicapai.

Secara lebih rinci, realisasi kinerja Program dan Kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada kondisi awal Renstra Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 akan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	**Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**																			
1	**TUJUAN 1**																			
	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	%				84.29	89.29	94.29	99.29		82.87	93.22	125.60	127.16		98	104	133	128	
	TUJUAN 2																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat.	%				80	80.20	80.5	81		80.06	81.88	86.53	86.65		100	102	107	107	
2	**SASARAN 1**																			
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%				15	20	25	30		15.66	25.36	50.97	52.53		104	127	204	175	
	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%				35.03	35.05	35.92	36.26		35.42	36.36	38.19	40.33		101	104	106	111	
	SASARAN 2																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai				79	80	81	81.5		83.12	83.12	87.75	89		104	103	108	109	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai				72.50	72.60	80.64	81		77.01	80.64	83.30	84.3		106	100	114	104	
3	**PROGRAM**																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	Skor				3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.32	3.51	3.60		100	95	100	102	
	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	%				77	78	79	82		81.13	82	92.30	86.84		105	105	117	106	
	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	%				80	90	80	93.17		74.16	93.17	91.01	93		93	104	114	99.9	
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis.	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional.	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
B	**Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026**																			
1	**TUJUAN 1**																			
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka								72					86.61					120

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	TUJUAN 2																			
	Indeks Kompetensi ASN	Angka								3.07					3.285					107
2	**SASARAN 1**																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka								80					88.75					111
	Indeks Manajemen Risiko	Angka								3					2.89					96
	SASARAN 2																			
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%								8.67					65.09					750
	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%								100					100					100
3	**PROGRAM**																			
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					100
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	%								100					100					100
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	Skor								100					100					100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	%								100					100					100
	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%								85					100					118
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	Angka								3.5					3.55					101
	Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	%								100					100					100

Dari data realisasi tersebut, terlihat bahwa pencapaian target Tujuan, Sasaran, dan Program di Tahun **2021 dan 2022** sudah sesuai dan melebihi dari target yang telah ditetapkan, baik dari Tujuan satu maupun Tujuan kedua. Sedangkan capaian untuk Program Sertifikasi Kompetensi ASN yang masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian seperti tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa antara lain :

1. Adanya regulasi dari Instansi Pembina/Pusat terkait dengan Pengembangan Kompetensi ASN;
2. Komitmen pimpinan dalam manajemen ASN;
3. Adanya jejaring kerja/networking dengan stakeholders;
4. Dukungan anggaran yang relatif memadai;
5. Ketersediaan sarana prasarana pelatihan yang memadai, baik secara e-learning maupun klasikal;
6. Lembaga memiliki beberapa jenis pelatihan yang sudah terakreditasi;
7. Penjaminan mutu pelatihan telah terstandar **ISO 21001:2018**;
8. Dukungan teknologi informasi dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
9. Adanya jenis pengembangan kompetensi klasikal dan non klasikal;
10. Adaptasi yang cepat dari Lembaga terhadap kondisi terkini yang sedang terjadi.

Dari segi anggaran, data realisasi keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dapat disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

NO	URAIAN	PAGU INDIKATIF RENSTRA PD PADA TAHUN (RP.)					APBD PADA TAHUN (RP.)					REALISASI ANGGARAN TAHUN / SAMPAI DENGAN TAHUN (RP.)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	PENDAPATAN	24.636.696.000	18.342.755.000	18.612.671.000	21.771.130.000	22.080.000.000	5.404.774.000	21.313.261.000	19.791.000.000	21.771.130.000	22.080.000.000	5.638.301.000	21.200.557.900	23.722.444.500	24.328.468.740	22.610.245.879	104,31	99,47	119,86	111.75	102.40	74.66	70.85
2	BELANJA	96.898.615.000	75.549.923.000	70.330.623.000	81.408.663.000	66.908.080.000	50.664.152.000	59.488.773.000	67.849.067.000	76.990.934.000	65.413.487.000	47.514.860.602	52.428.138.452	65.607.086.848	71.584.261.409	63.181.626.208	93,78	88,13	96,70	92,98	96,59	7.48	8.21
3	PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum.

Beberapa permasalahan yang muncul di BPSDMD dapat diidentifikasi sebagai berikut :

TABEL 2.4
PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN		
		Pengembangan kompetensi Belum Mengakomodir Seluruh ASN	
			• Belum semua Widyaiswara memiliki kualifikasi kompetensi tertentu • Belum tercukupinya jumlah pengelola pelatihan yang memenuhi kualifikasi • Belum tercukupinya jumlah penyelenggara pengembangan kompetensi yang memenuhi kualifikasi • Belum tercukupinya jumlah pengelola sistem informasi yang memenuhi kualifikasi • Belum terpenuhinya SARPRAS fisik • Belum terpenuhinya SARPRAS non fisik • Belum semua OPD menyusun identifikasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kebutuhan pengembangan kompetensi • Belum semua Kab/Kota menyusun identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi • Belum semua jabatan memiliki standar kompetesni jabatan • Belum tercukupinya jenis pengembangan kompetensi yang diselenggarakan • Semua pengembangan kurikulum pembelajaran belum sesuai kebutuhan
		Belum optimalnya Penjaminan mutu Pengembangan Kompetensi	
			• Belum seluruhnya program pelatihan terakreditasi • Belum Optimalnya Juknis Pembelajaran Penyelenggaran pengembangan kompetensi lengkap • Belum seluruhnya terpenuhi standar mutu pengembangan kompetensi • Masih diperlukan standar evaluasi pengembangan kompetensi
		Minat terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi ASN masih rendah	
			• Belum adanya ketertarikan Desain Pembelajaran • Belum semua tersusunnya sistem pola karier berbasis kompetensi • Belum adanya informasi tentang pengembangan kompetensi memadai
		Belum terpadunya rencana pengembangan kompetensi	
			• Belum terintegrasinya data pengembangan kompetensi • Belum semua jabatan memiliki standar kompetensi jabatan • Penetapan rencana pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Belum semua ASN Tersertifikasi dan Berkompeten		
		Belum semua jabatan memiliki skema sertifikasi kompetensi	
			• Belum semua jabatan teridentifikasi skema sertifikasi kompetensi • Belum tersedianya standar kompetensi jabatan tertentu
		Jumlah Sertifikasi kompetensi ASN belum sepenuhnya sesuai kebutuhan kompetensi ASN	
			• Belum tersedianya data sertifikasi kompetensi • Belum memadainya SDM Asessor

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Identifikasi isu-isu strategis dilakukan melalui teknik Focused Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar dalam merumuskan isu strategis, yang kemudian diadakan pembobotan terhadap isu-isu terpilih. Isu-isu itu pun sudah diuji melalui beberapa tolok ukur, diantaranya : aktualitas (seberapa besar isu menjadi pusat perhatian), problematik (seberapa kompleks isu tersebut membutuhkan upaya penyelesaian), kekhalayakan (seberapa besar dampak yang ditimbulkan isu apabila tidak diselesaikan) dan layak (seberapa sesuai isu dengan tugas pokok dan fungsi).

Melihat dari gambaran pelayanan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah maka dapat ditentukan isu-isu strategis terkait dengan pengembangan kompetensi aparatur di Jawa Tengah.

TABEL 2.5
PERUMUSAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Adanya regulasi yang mendukung pengembangan kompetensi SDM aparatur • Adanya komitmen pimpinan dalam manajemen ASN • Adanya jejaring kerja / networking dengan stakeholders • Kondisi kompetensi ASN di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan • Tingkat penguasaan ASN terhadap teknologi informasi cukup memadai • Dukungan anggaran relatif memadai • Adanya jenis pengembangan kompetensi klasikal dan non klasikal	• Sistem Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi belum bisa mengakses seluruh PNS • Belum optimalnya program pengembangan talenta sebagai salah satu infrastruktur pendukung manajemen talenta ASN, sebagai dasar dalam mengidentifikasi permasalahan di level OPD berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPSDMD Prov. Jateng. • Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis belum mengacu pada pengisian gap kompetensi teknis berdasarkan standar kompetensi teknis • Kurikulum dan modul sesuai hasil kebutuhan pengembangan		• Pengunaan media informasi dalam segala jenis penyampaian informasi di era modern. • Penggunaan Teknologi dalam banyak kegiatan, salah satunya dalam kegiatan pengembangan kompetensi dan pelatihan-pelatihan lainnya. • Adanya pergeseran metode pelatihan dampak dari Pandemi *Covid-19* yang sehingga banyak metode baru yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kompetensi seperti	• Masih adanya regulasi pengembangan kompetensi yang tumpang tindih antar Kementerian / Lembaga. Masing-masing memiliki standar / aturan yang berbeda-beda, sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam menentukan acuan yang jelas. • Masih terbatasnya kewenangan daerah dalam pelaksanaan penjaminan mutu kompetensi ASN melalui sertifikasi kompetensi. Pada-hal di masa depan, sertifikasi kompetensi menjadi	• Hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi belum sepenuhnya optimal • Terbatasnya standar perangkat pembelajaran berbasis kompetensi (baik kuantitas maupun kualitas) • Belum adanya pemetaan per jenis kompetensi SDM • Belum optimalnya rencana pengembangan kompetensi SDM • Model pelatihan masih bersifat klasikal • Kurangnya sarana pendukung	• BPSDMD Provinsi Jawa Tengah agar lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. • Urgensi Peran Strategic Partnership dalam pengembangan kompetensi. Diperlukan peran Corporate dalam Strategi Pengembangan Kompetensi untuk mengidentifikasi, menilai dan mengembangkan pengetahuan, keahlian serta kemampuan pegawai

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Perkembangan teknologi pem- belajaran yang semakin modern • Kualitas pelayanan publik yang makin meningkat • Kualitas SDM aparatur yang memiliki daya saing global	kompetensi (AKPK) belum semua bisa dilakukan • Penyelenggaran pelatihan sering tidak menggunakan kurikulum, modul • Belum optimalnya pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang kompetensi • Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial perangkat daerah • Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan fungsional • Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan teknis bagi sebagian besar ASN • Belum optimalnya Penjaminan mutu pelatihan • Belum seluruhnya program pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi		*Online Classroom, Massive Open Online Course (MOOC).*	kebutuhan bagi setiap ASN dalam upaya penjaminan mutu kompetensi. Hal ini tentu tak mungkin dapat terselesaikan dengan cepat, bila semua harus ditangani langsung oleh pemerintah pusat. • Belum adanya standar kompetensi jabatan yang baku sebagai dasar pedoman pengukuran tingkat kompetensi dan profesionalisme ASN di daerah.	praktik pembelajaran • Sistem informasi pengembangan kompetensi belum sepenuhnya terintegrasi dan pemanfaatan belum optimal • Belum optimalnya penguasaan SDM terhadap teknologi pembelajaran • Belum semua kebutuhan formasi jabatan pegawai terpenuhi sesuai standar kompetensi; • Tuntutan peningkatan layanan kepegawaian yang cepat, murah dan mudah terhambat dengan kurang tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur IT	dalam memenuhi kebutuhan organisasi. • Transformasi Teknologi Bangkom, transformasi Paradigma Pengembangan Kompetensi dari Training and Development ke In Learning Development. Transformasi pembelajaran digital untuk efektivitas pembelajaran dan efisiensi anggaran melalui metode e-learning dan blended learning sebagai satu metode pembelajaran menjadi semakin dibutuhkan pada saat dunia dihadapkan pada era society 5.0 • SDM ASN yang BERAKHLAK. Kesadaran ASN Jawa

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	• Sertifikasi Kompetensi belum sepenuhnya menjadi dasar Kompetensi ASN • Belum optimalnya implementasi manajemen kepegawaian dan komitmen untuk mengimplementasikan sistem merit sebagai amanah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan antara lain belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan OPD terkait • Kebutuhan kerja kolaboratif dan terintegrasi termasuk dengan Pusat dan Kabupaten/Kota guna peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN untuk pelayanan publik yang lebih baik, dalam upaya				yang memadai selain kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi dan menguasai IT	Tengah mengenai core value BerAKHLAK perlahan mulai terbangun di setiap instansi, didalamnya memuat standar perilaku kerja pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja khususnya pada penilaian kinerja pegawai. Pemerintah telah mengakomodir core value tersebut melalui Peraturan Menteri PAN dan RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Namun hal tersebut dirasa belum cukup untuk mengakselerasi upaya pemerintah dalam menginternalisasikan core value tersebut kepada seluruh ASN Jawa Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	percepatan pencapaian target pembangunan daerah serta dalam rangka menghadapi perubahan yang cepat di era society 5.0, agar mampu memberikan pelayanan yang optimal.					• Birokrasi berkelas dunia menuju SMART ASN. Pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan visi Presiden yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam visi tersebut, pengembangan ASN menjadi salah satu prioritas kerja. SDM aparatur yang bekerja keras, melayani masyarakat, dinamis, terampil serta memiliki kemampuan dalam penguasaan IPTEK, hal ini menjadi dasar untuk mewujudkan ASN berkelas dunia

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tentu saja akan sejalan dan searah dengan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025-2029 yaitu "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan" berlandasan Visi "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045" dan Misi: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas.

Sebagai lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi bagi ASN Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dituntut mampu mewujudkan ASN Profesional untuk *Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah* dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatkan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Indeks Kompetensi ASN.

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan kondisi hasil yang diharapkan agar tujuan dapat tercapai, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan sasaran memperhatikan perumusan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah dengan tujuan yang ada maka sasaran yang ingin dicapai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun kedepan adalah

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di BPSDMD dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di BPSDMD dengan indikator Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
3. Meningkatnya Daya Saing Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN dengan indikator persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pengembangan Kompetensi
4. Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN dengan indikator presentase ASN yang tersertifikasi kompetensi

Adapun keselarasan antara Tujuan dan Sasaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah		Indeks Kompetensi ASN	Angka	0	3.07	3.08	3.10	3.15	3.18	3.20	3.25	3.25
		Meningkatnya Daya Saing Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pengembangan Kompetensi	%	0	8.67	17.34	26.10	34.86	43.62	52.38	61.14	61.14
		Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN	presentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetap kan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di BPSDMD		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BPSDMD	Angka	0	72	73	74	75	76	77	78	78
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di BPSDMD	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah BPSDMD	Angka	80	80	80	80	80	80	80	80	80
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di BPSDMD	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah BPSDMD	Angka	3	3	3.05	2.89	2.92	2.94	2.96	2.98	2.98

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tentu saja dalam mewujudkan tujuan terkait tentang pengembangan kompetensi tidak luput dari bagaimana strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan.

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Perumusan strategi dan arah kebijakan memperhatikan pohon kinerja dan cascading yang sudah disusun, dan selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kompetensi ASN	Meningkatnya Daya Saing Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	Penguatan Implementasi Kebijakan Jateng Corpu	Melakukan analisis melalui Jateng Corpu untuk mendapatkan kebutuhan Pengembangan Kompetensi berbasis data dalam rangka merancang program Pengembangan Kompetensi yang sesuai.
			Melakukan fasilitasi dan koordinasi baik OPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota baik melalui forum atau yang lain dalam rangka penerapan Jateng corpu secara menyeluruh
		Penyelenggaraan Bangkom Terkini	Mengimplementasikan Pengembangan Kompetensi dengan model pembelajaran 70:20:10.
			Memperkuat kompetensi ASN dalam bidang kepemimpinan dan inovasi melalui Pengembangan Kompetensi intensif.
			Meningkatkan jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi.
			Mengembangkan modul Pengembangan Kompetensi berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik ASN di berbagai sektor.
			Mengintensifkan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk seluruh ASN yang menduduki Jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
			Mendukung implementasi sistem merit secara menyeluruh melalui pengembangan kompetensi yang inklusif.
			Memperkuat Pengembangan Kompetensi tematik yang mendukung pengelolaan isu-isu strategis seperti keberlanjutan,

			perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup.
			Meningkatkan kompetensi ASN dalam bidang komunikasi publik dan diplomasi untuk mendukung kerja sama nasional dan internasional sebagai upaya mendukung Indonesia Emas 2045.
			Mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan selama periode renstra untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu ditingkatkan
		Kolaborasi Multi-Stakeholder	Meningkatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
			Memperkuat program Pengembangan Kompetensi berbasis kolaborasi antar instansi untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan talenta ASN
	Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi ASN	Identifikasi kebutuhan Serkom secara komprehensif	Meningkatkan jumlah ASN yang memiliki sertifikasi dan kompetensi
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di BPSDMD	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah BPSDMD	Peningkatan Infrastruktur Pengembangan Kompetensi	Mengintegrasikan sistem pengembangan kompetensi dengan sistem pengelolaan talenta ASN.
			Meningkatkan layanan bangkom berbasis teknologi terkini
			Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah BPSDMD	Monitoring dan Evaluasi	Identifikasi secara komprehesnif terhadap resiko dan rencana tindak pengendalian yang akan dilaksanakan
			Monitoring dan evaluasi terhadap risiko yang teridentifikasi

Selain itu, pentahapan pembangunan yang dimaksudkan ntuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Prioritas dalam setiap tahapan harus mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan sebelumnya. Pentahapan dimaksud disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.2
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
• Penguatan Implementasi Kebijakan Jateng Corpu • Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi terkini guna Penguatan Landasan Pembangunan Daerah dalam "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"	• Peningkatan Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi • Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi terkini guna Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah dalam "Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi"	• Akselerasi penggunaan berbagai varian pengembangan kompetensi • Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi terkini guna Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah dalam "Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau"	• Pengintegrasian sistem pengembangan kompetensi dengan sistem pengelolaan talenta ASN. • Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi terkini guna Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah dalam "Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan"	• Pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan selama periode renstra untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu ditingkatkan. • Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi terkini guna Perwujudan Kinerja Pembangunan Daerah dalam "Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan"

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Identifikasi risiko dilakukan secara komprehensif pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah di BPSDMD dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.1

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	IndikatorKinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu Peyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kompetensi ASN	Indeks Kompetensi ASN	**Indeks Kompetensi ASN tidak mencapai target**	Tinggi	**Perubahan kebijakan**	Kegiatan bangkom tidak maksimal	Penerapan Transformasi Pengembangan Kompetensi ASN	Kepala Daerah	5 tahun
Meningkatnya Daya Saing Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pengembangan Kompetensi	Hasil diklat (peserta) belum berkontribusi bagi pelaksanaan tugas di organisasinya	Tinggi	Pengiriman peserta Diklat tidak sesuai dengan standar kompetensi jabatan Pelaksanaan Jateng Corpu masih belum maksimal	Kinerja ASN tidak maksimal Jateng Corpu belum terlaksana dengan baik di OPD Provinsi/Kab Kota	Mendorong OPD Provinsi/Kab Kota mengirim peserta sesuai profil jabatan Penguatan Implementasi Kebijakan Jateng Corpu	Kepala BPSDMD	5 tahun
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Tidak meratanya informasi pelaksanaan bangkom yang dilakukan OPD dan Kab/Kota	Tinggi	Ketidaktahuan OPD Provinsi/Kab Kota mengenai Jateng Corpu	BPSDMD sebagai lembaga Pelatihan Terakreditasi di Jawa tengah tidak dapat mengukur proses pelaksanaan Bangkom pada Stakeholder terkait	Sosialisasi, Rekonsiliasi, Jateng Corpu kepada stakeholder terkait	Kepala BPSDMD	5 tahun

Keterangan:

- Yang disajikan dalam tabel diatas merupakan risiko prioritas yang merupakan hasil proses manajemen risiko - Kertas kerja manajemen risiko dilampirkan dalam dokumen Renstra PD

- Hasil seluruh proses manajemen risiko yang dituangkan dalam dokumen Renstra PD harus sesuai dengan yang diinput dalam e-planning atau tabel dapat diunduh dari e-planning

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 terbagi menjadi 5 periode sebagai bentuk implementasi adanya regulasi Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu tahun 2025,2026,2027,2028, serta 2029. Pada tahun 2025 berisi rencana program, kegiatan dan target kinerja dari implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, sedangkan tahun 2026 berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil pemetaan dalam Renha PD tahun 2026 , kemudian tahun 2027, 2028, serta 2029 berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil pemetaan cascading dan desk dengan pengampu.

Kesepakatan Forum PD untuk Penyempurnaan Dokumen Renstra sudah diakomodir dalam program, kegiatan dan sub kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dengan poin-poin sebagai berikut :

1. Pengembangan Kompetensi Jawa Tengah diseleraskan dengan akselerasi transformasi pembelajaran melalui *Jateng Corporate University;*
2. Perwujudan ASN Profesional selaras dengan peningkatan integritas ASN dalam pelayanan publik;
3. Tantangan BPSDMD pada era hari ini yaitu kemandirian pembelajaran dalam rangka pengembangan kompetensi harus menunjang manajemen talenta dan peningkatan karir ASN serta mempertikan pengarusutamaan gender pada setiap pengembangan kompetensi;
4. BPSDMD agar memperhatikan permasalahan bagi jabatan fungsional tertentu dalam pemenuhan pengembangan kompetensi.

Renstra tahun 2025-2029 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berisikan 1 (satu) Program yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, 3 (tiga) kegiatan yaitu Pengembangan Kompetensi Teknis; Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi Kementerian Dalam Negeri. Adapun Program dan Kegiatan di dukung melalui 12 (dua belas) Sub Kegiatan diantaranya :

1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri;
4. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara

Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;

6. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
7. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional;
8. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional;
9. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
10. Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi;
11. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri.

Penentuan rencanna program, kegiatan , sub kegiatan dan pendanaan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

\

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah *												27.797.005.000		20.459.200.000		21.174.195.000		21.577.815.000		23.018.510.950	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
							Indeks Kompetensi ASN *	Angka	3,07	3,08	3,1		3,15		3,18		3,2		3,25		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya daya saing kompetensi sumber daya manusia ASN **											26.100.000.000		18.600.000.000		19.200.000.000		19.500.000.000		20.800.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
							Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi **	%	8,67	17,34	26,1	26.100.000.000	34,86	18.600.000.000	43,62	19.200.000.000	52,38	19.500.000.000	61,14	20.800.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ***								1.600.000.000		1.750.000.000		1.900.000.000		2.050.000.000		2.200.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	
						Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi teknis	Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis ***	%	100	95	95,5	1.600.000.000	96	1.750.000.000	96,5	1.900.000.000	97	2.050.000.000	97,5	2.200.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	
		5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis ****								1.600.000.000		1.750.000.000		1.900.000.000		2.050.000.000		2.200.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	
						Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis ****	Orang	2910	17320	23000	1.600.000.000	29000	1.750.000.000	34000	1.900.000.000	42000	2.050.000.000	50000	2.200.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	
		5.04.02.1.01.0003			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan							1.600.000.000		1.750.000.000		1.900.000.000		2.050.000.000		2.200.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	

					Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum *****															
						Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum *****	Orang	1140	5800	8000	600.000.000	10000	650.000.000	12000	700.000.000	16000	750.000.000	20000	800.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
						Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Pengukuran jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis inti *****	Orang	920	5760	7500	500.000.000	9000	550.000.000	10000	600.000.000	12000	650.000.000	14000	700.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
						Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan *****	Orang	850	5760	7500	500.000.000	10000	550.000.000	12000	600.000.000	14000	650.000.000	16000	700.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ***									1.200.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000		1.650.000.000		1.800.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi	

																			Jabatan Fungsional	
						Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional ***	%	100	95	95,5	1.200.000.000	96	1.350.000.000	96,5	1.500.000.000	97	1.650.000.000	97,5	1.800.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	
		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ****								1.200.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000		1.650.000.000		1.800.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ****	Orang	1267	1120	1200	1.200.000.000	1280	1.350.000.000	1355	1.500.000.000	1430	1.650.000.000	1430	1.800.000.000	Pokja Penjenjangan Jabatan Fungsional	
		5.04.02.1.02.0007			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan							1.200.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000		1.650.000.000		1.800.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	

					Prajabatan *****															
						Terselenggaranya pelatihan pembentukan jabatan fungsional	Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional *****	Orang	467	660	700	500.000.000	740	550.000.000	785	600.000.000	830	650.000.000	830	700.000.000	Pokja Penjenjangan Jabatan Fungsional	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
						Terselenggaranya peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional *****	Orang	400	250	270	400.000.000	290	450.000.000	305	500.000.000	320	550.000.000	320	600.000.000	Pokja Penjenjangan Jabatan Fungsional	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
						Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional *****	Orang	400	210	230	300.000.000	250	350.000.000	265	400.000.000	280	450.000.000	280	500.000.000	Pokja Penjenjangan Jabatan Fungsional	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH

		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ***								23.300.000.000		15.500.000.000		15.800.000.000		15.800.000.000		16.800.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	
						Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase tingkat kelulusan pengembangan kompetensi manajerial, sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri ***	%	100	95	95,5	23.300.000.000	96	15.500.000.000	96,5	15.800.000.000	97	15.800.000.000	97,5	16.800.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	
		5.04.02.1.03		Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri ****							23.300.000.000		15.500.000.000		15.800.000.000		15.800.000.000		16.800.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	

						Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan Dalam Negeri ****	Orang	2463	1626	3920	23.300.000.000	2420	15.500.000.000	2580	15.800.000.000	2820	15.800.000.000	2780	16.800.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	
		5.04.02.1.03.0002			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri *****							23.300.000.000		15.500.000.000		15.800.000.000		15.800.000.000		16.800.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	
						Terselenggarannya Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS *****	Orang	168	131	2000	8.500.000.000	400	1.700.000.000	400	2.000.000.000	480	2.000.000.000	480	2.200.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
						Terselenggarannya Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas *****	Orang	230	200	200	2.500.000.000	200	2.500.000.000	200	2.500.000.000	200	2.500.000.000	200	3.000.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
						Terselenggarannya Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator *****	Orang	200	200	200	3.200.000.000	240	3.200.000.000	200	3.200.000.000	200	3.200.000.000	200	3.500.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH

						Terselenggaranya Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama *****	Orang	120	95	120	2.500.000.000	120	2.500.000.000	120	2.500.000.000	120	2.500.000.000	120	2.500.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
						Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah *****	Orang	1745	1000	1000	4.000.000.000	1000	3.000.000.000	1100	3.000.000.000	1100	3.000.000.000	1100	3.000.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
						Terselenggaranya Pelatihan Pim Pemdagri jenjang Pengawas	Jumlah Peserta Pealtihan Pim pemdagri jenjang Pengawas *****	Orang	N/A	N/A	120	900.000.000	140	900.000.000	160	900.000.000	180	900.000.000	200	900.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
						Terselenggaranya Pelatihan Pim Pemdagri jenjang Administrator	Jumlah Peserta Pelatihan Pim Pemdagri jenjang administrator *****	Orang	N/A	N/A	120	900.000.000	140	900.000.000	160	900.000.000	280	900.000.000	200	900.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
						Terselenggaranya Pelatihan Pim Pemdagri jenjang JPT	Jumlah Peserta Pelatihan Pim Pemdagri jenjang JPT *****	Orang	N/A	N/A	40	500.000.000	60	500.000.000	80	500.000.000	100	500.000.000	120	500.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
						Terselenggaranya Orientasi Pim Pemdagri	Jumlah Peserta Orientasi Pim Pemdagri *****	Orang	N/A	N/A	120	300.000.000	120	300.000.000	160	300.000.000	160	300.000.000	160	300.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH

	Terpenuhinya kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN **										1.697.005.000		1.859.200.000		1.974.195.000		2.077.815.000		2.218.510.950	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
							Persentase ASN yang tersertifikasi Kompetensi **	%	100	100	100	1.697.005.000	100	1.859.200.000	100	1.974.195.000	100	2.077.815.000	100	2.218.510.950	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ***								1.697.005.000		1.859.200.000		1.974.195.000		2.077.815.000		2.218.510.950	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
						Terjaganya kualitas mutu pelaksanaan pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan) ***	Angka	3,5	3,5	3,5	334.500.000	3,5	390.250.000	3,5	439.500.000	3,5	483.750.000	3,5	534.500.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
		5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis ****							41.000.000		50.750.000		59.000.000		67.250.000		72.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	

						Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis ****	Dokumen	3	3	3	41.000.000	3	50.750.000	3	59.000.000	3	67.250.000	3	72.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	
		5.04.02.1.01.0002			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum *****								16.000.000		17.500.000		19.000.000		20.500.000		21.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
						Ketersediaan Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan *****	Dokumen	1	1	1	8.000.000	1	8.750.000	1	9.500.000	1	10.250.000	1	10.500.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

		5.04.02.1.01.0004			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum *****							33.000.000		42.000.000		49.500.000		57.000.000		61.500.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
						Ketersediaan dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan *****	Dokumen	18	15	17	6.000.000	18	7.000.000	20	8.500.000	22	10.000.000	24	11.500.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
						Ketersediaan jumlah angkatan pengembangan kompetensi yang di evaluasi	Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi *****	Dokumen	15	18	20	27.000.000	22	35.000.000	24	41.000.000	27	47.000.000	29	50.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ****							293.500.000		339.500.000		380.500.000		416.500.000		462.500.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ****	Dokumen	3	3	3	293.500.000	3	339.500.000	3	380.500.000	3	416.500.000	3	462.500.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional *****							11.000.000		13.000.000		15.000.000		17.000.000		19.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
						Ketersediaan dokumen Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan *****	Dokumen	10	10	20	5.500.000	22	6.500.000	24	7.500.000	26	8.500.000	28	9.500.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

		5.04.02.1.02.0008			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan *****							288.000.000		333.000.000		373.000.000		408.000.000		453.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
						Ketersediaan dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan *****	Dokumen	13	16	18	58.000.000	21	68.000.000	23	78.000.000	26	88.000.000	29	98.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
						Ketersediaan dokumen pemeliharaan standar mutu	Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu *****	Dokumen	1	1	1	65.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000	1	105.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah,

																				JAWA TENGAH
						Terselenggaranya pelatihan yang diakreditasi	Jumlah pelatihan yang diakreditasi *****	Jenis	1	3	1	80.000.000	1	95.000.000	1	105.000.000	1	115.000.000	1	125.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
						Ketersediaan jumlah angkatan pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi *****	Angka	24	26	28	85.000.000	30	95.000.000	32	105.000.000	34	110.000.000	36	125.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
						Terjaganya kualitas perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan ***	%	100	100	100	391.500.000	100	468.950.000	100	510.695.000	100	546.065.000	100	612.010.950	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
		5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis ****								162.000.000		216.500.000		233.000.000		250.500.000		276.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan	

																				Penjaminan Mutu	
						Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis ****	Dokumen	3	3	3	162.000.000	3	216.500.000	3	233.000.000	3	250.500.000	3	276.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	
		5.04.02.1.01.0001			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum *****							77.000.000		82.500.000		86.000.000		88.500.000		99.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
						Ketersediaan dokumen metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	Jumlah dokumen metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan *****	Dokumen	1	1	1	7.000.000	1	7.500.000	1	8.000.000	1	8.500.000	1	9.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

						Ketersediaan dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang disusun	Jumlah dokumen analisis pengembangan kompetensi bagi OPD/Kab/Kota *****	Dokumen	2	2	2	70.000.000	2	75.000.000	2	78.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		5.04.02.1.01.0002			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum *****							170.000.000		268.000.000		294.000.000		324.000.000		354.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
						Ketersediaan dokuman perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan *****	Dokumen	10	10	10	85.000.000	10	134.000.000	10	147.000.000	10	162.000.000	10	177.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ****							229.500.000		252.450.000		277.695.000		295.565.000		336.010.950	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional ****	Dokumen	3	3	3	229.500.000	3	252.450.000	3	277.695.000	3	295.565.000	3	336.010.950	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	
		5.04.02.1.02.0001			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional *****							114.500.000		125.950.000		138.545.000		142.500.000		167.639.450	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	

						Ketersediaan dokumen metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	Jumlah Dokumen Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan *****	Dokumen	1	1	1	7.500.000	1	8.250.000	1	9.075.000	1	9.500.000	1	10.980.750	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
						Ketersediaan dokumen Analisis Pengembangan Kompetensi	Jumlah dokumen analisis pengembangan kompetensi bagi OPD/Kab/Kota *****	Dokumen	2	2	2	32.000.000	2	35.200.000	2	38.720.000	2	40.000.000	2	46.851.200	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
						Fasilitasi Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Dokumen Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya *****	Dokumen	24	24	24	75.000.000	24	82.500.000	26	90.750.000	26	93.000.000	26	109.807.500	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional *****							230.000.000		253.000.000		278.300.000		306.130.000		336.743.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	

						Ketersedian dokumen Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan *****	Dokumen	1	1	1	115.000.000	1	126.500.000	1	139.150.000	1	153.065.000	1	168.371.500	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
						Terpenuhinya persentase ASN yang lulus Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN lulus dan tersertifikasi kompetensi ***	%	100	50	50	971.005.000	50	1.000.000.000	50	1.024.000.000	50	1.048.000.000	50	1.072.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ****								554.000.000		580.000.000		594.000.000		608.000.000		622.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
						Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi ****	Dokumen	2	2	2	554.000.000	2	580.000.000	2	594.000.000	2	608.000.000	2	622.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	
		5.04.02.1.02.0002			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi *****								54.000.000		60.000.000		64.000.000		68.000.000		72.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan	

																			Penjaminan Mutu	
						Fasilitasi pembentukan/peningkatan kompetensi asessor	Jumlah kualifikasi asessor kompetensi yang dimiliki *****	Orang	2	1	2	32.000.000	2	35.000.000	2	37.000.000	2	40.000.000	2	42.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
						Ketersediaan jumlah dokumen skema sertifikasi	Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi *****	Dokumen	1	2	2	22.000.000	2	25.000.000	2	27.000.000	2	28.000.000	2	30.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		5.04.02.1.02.0003			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota *****							500.000.000		520.000.000		530.000.000		540.000.000		550.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
						Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi *****	Orang	300	350	350	500.000.000	350	520.000.000	350	530.000.000	350	540.000.000	350	550.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah,

																				JAWA TENGAH
		5.04.02.1.03		Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri ****								417.005.000		420.000.000		430.000.000		440.000.000		450.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
						Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri ****	Dokumen	N/A	N/A	1	417.005.000	1	420.000.000	1	430.000.000	1	440.000.000	1	450.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	
		5.04.02.1.03.0003			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri *****							417.005.000		420.000.000		430.000.000		440.000.000		450.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
						Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri *****	Orang	N/A	100	200	417.005.000	200	420.000.000	200	430.000.000	200	440.000.000	200	450.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah *												46.233.000.000		61.714.262.000		66.107.940.000		70.018.426.000		77.637.354.050	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah *	Angka	72	73	74		75		76		77		78		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah **											350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah **	Angka	3	3,05	2,89	350.000.000	2,92	350.000.000	2,94	350.000.000	2,96	350.000.000	2,98	350.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ***	%	100	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							84.000.000		94.000.000		100.000.000		112.000.000		120.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	10	10	10	84.000.000	10	94.000.000	10	100.000.000	10	112.000.000	10	120.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							251.000.000		241.000.000		235.000.000		223.000.000		215.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	21	21	21	251.000.000	21	241.000.000	21	235.000.000	21	223.000.000	21	215.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	11	5.000.000	11	5.000.000	11	5.000.000	11	5.000.000	11	5.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah **											45.883.000.000		61.364.262.000		65.757.940.000		69.668.426.000		77.287.354.050	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah **	Angka	80	80	80	45.883.000.000	80	61.364.262.000	80	65.757.940.000	80	69.668.426.000	80	77.287.354.050	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									45.883.000.000		61.364.262.000		65.757.940.000		69.668.426.000		77.287.354.050	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan	%	100	100	100	45.883.000.000	100	61.364.262.000	100	65.757.940.000	100	69.668.426.000	100	77.287.354.050	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

						Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ***													
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								32.169.000.000		35.386.300.000		38.916.350.000		42.202.800.000		43.280.800.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	6	6	6	32.169.000.000	6	35.386.300.000	6	38.916.350.000	6	42.202.800.000	6	43.280.800.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							27.000.000.000		29.700.000.000		32.670.000.000		35.937.000.000		36.000.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	131	133	133	27.000.000.000	133	29.700.000.000	133	32.670.000.000	133	35.937.000.000	133	36.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							4.955.000.000		5.450.500.000		5.995.550.000		6.000.000.000		7.000.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	1	1	1	4.955.000.000	3	5.450.500.000	3	5.995.550.000	3	6.000.000.000	3	7.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH,, JAWA TENGAH OPD Provinsi

		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							76.000.000		84.000.000		92.000.000		100.000.000		110.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	1	1	1	76.000.000	5	84.000.000	5	92.000.000	5	100.000.000	5	110.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH,, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****							78.000.000		85.800.000		85.800.000		85.800.000		85.800.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	1	1	1	78.000.000	2	85.800.000	2	85.800.000	2	85.800.000	2	85.800.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH,, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD *****							60.000.000		66.000.000		73.000.000		80.000.000		85.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	1	1	1	60.000.000	6	66.000.000	6	73.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH,, JAWA TENGAH OPD Provinsi

		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****							0		0		0		0		0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****	Dokumen	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH,, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								240.000.000		285.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	240.000.000	1	285.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							240.000.000		285.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	2	2	2	240.000.000	2	285.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perang								130.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

				kat Daerah ****																
						Meningkatnya pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ****	Laporan	1	1	1	130.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****							130.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	1	1	1	130.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	12	170.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								470.000.000		564.000.000		690.000.000		720.000.000		1.000.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	470.000.000	100	564.000.000	100	690.000.000	100	720.000.000	100	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							70.000.000		84.000.000		110.000.000		120.000.000		150.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	10	10	10	70.000.000	10	84.000.000	10	110.000.000	10	120.000.000	10	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							400.000.000		480.000.000		580.000.000		600.000.000		850.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	30	35	40	400.000.000	45	480.000.000	50	580.000.000	55	600.000.000	60	850.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								2.849.000.000		3.430.400.000		4.144.480.000		4.430.000.000		6.118.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	2.849.000.000	100	3.430.400.000	100	4.144.480.000	100	4.430.000.000	100	6.118.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							432.000.000		510.000.000		520.000.000		600.000.000		900.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	432.000.000	1	510.000.000	1	520.000.000	1	600.000.000	1	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							500.000.000		620.000.000		864.000.000		880.000.000		1.300.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	500.000.000	1	620.000.000	1	864.000.000	1	880.000.000	1	1.300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							400.000.000		480.000.000		576.000.000		600.000.000		700.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	400.000.000	1	480.000.000	1	576.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							300.000.000		360.000.000		432.000.000		500.000.000		625.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	300.000.000	1	360.000.000	1	432.000.000	1	500.000.000	1	625.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						100.000.000		120.000.000		144.000.000		170.000.000		210.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	100.000.000	1	120.000.000	1	144.000.000	1	170.000.000	1	210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						42.000.000		50.400.000		60.480.000		70.000.000		88.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	12	42.000.000	12	50.400.000	12	60.480.000	12	70.000.000	12	88.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						100.000.000		120.000.000		144.000.000		150.000.000		210.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
					Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	100.000.000	12	120.000.000	12	144.000.000	12	150.000.000	12	210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi

		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							350.000.000		420.000.000		504.000.000		550.000.000		730.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	350.000.000	12	420.000.000	12	504.000.000	12	550.000.000	12	730.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							25.000.000		30.000.000		36.000.000		40.000.000		55.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	12	12	12	25.000.000	12	30.000.000	12	36.000.000	12	40.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							600.000.000		720.000.000		864.000.000		870.000.000		1.300.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	4	6	6	600.000.000	6	720.000.000	6	864.000.000	6	870.000.000	6	1.300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								2.630.000.000		9.032.562.000		8.199.900.000		8.055.000.000		9.823.098.050	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

				Pemerintah Daerah ****																
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	2.630.000.000	1	9.032.562.000	1	8.199.900.000	1	8.055.000.000	1	9.823.098.050	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							895.000.000		2.125.000.000		1.149.500.000		1.000.000.000		1.297.800.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	14	58	69	895.000.000	34	2.125.000.000	89	1.149.500.000	63	1.000.000.000	63	1.297.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							35.000.000		42.000.000		50.400.000		55.000.000		72.576.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	35.000.000	1	42.000.000	1	50.400.000	1	55.000.000	1	72.576.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							1.700.000.000		6.865.562.000		7.000.000.000		7.000.000.000		8.452.722.050	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	14	37	22	1.700.000.000	39	6.865.562.000	70	7.000.000.000	70	7.000.000.000	70	8.452.722.050	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								4.859.000.000		9.381.000.000		10.057.210.000		10.410.626.000		11.945.736.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1	1	1	4.859.000.000	1	9.381.000.000	1	10.057.210.000	1	10.410.626.000	1	11.945.736.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							10.000.000		12.000.000		14.400.000		17.280.000		20.736.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	12	10.000.000	12	12.000.000	12	14.400.000	12	17.280.000	12	20.736.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							2.000.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000		4.050.000.000		5.000.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	12	2.000.000.000	12	3.500.000.000	12	4.000.000.000	12	4.050.000.000	12	5.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH<br

							yang Disediakan *****													>OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							2.849.000.000		5.869.000.000		6.042.810.000		6.343.346.000		6.925.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	2.849.000.000	12	5.869.000.000	12	6.042.810.000	12	6.343.346.000	12	6.925.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH >OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								2.536.000.000		3.135.000.000		3.240.000.000		3.280.000.000		4.489.720.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Dokumen	1	1	1	2.536.000.000	1	3.135.000.000	1	3.240.000.000	1	3.280.000.000	1	4.489.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							200.000.000		240.000.000		288.000.000		300.000.000		414.720.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	27	27	27	200.000.000	27	240.000.000	27	288.000.000	27	300.000.000	27	414.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							36.000.000		45.000.000		52.000.000		60.000.000		75.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	763	763	763	36.000.000	763	45.000.000	763	52.000.000	763	60.000.000	763	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							1.500.000.000		1.650.000.000		1.700.000.000		1.710.000.000		2.000.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	41	41	41	1.500.000.000	41	1.650.000.000	41	1.700.000.000	41	1.710.000.000	41	2.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							800.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.210.000.000		2.000.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	376	376	376	800.000.000	676	1.200.000.000	676	1.200.000.000	676	1.210.000.000	676	2.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tabel 4.2
Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	*Rencana Aktivitas Riil*	Output	Target/Volume						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4							5	6	7
				2025	2026	2027	2028	2039	2030			
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping disabilitas	Peningkatan kapasitas Guru Pendamping Khusus (GPK) jenjang DIKDAS dan DIKMEN di Sekolah Inklusi (kerjasama dengan BPSDMD)	Orang	-	40	120	120	160	160	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ; Sub Kegiatan Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2	Pendidikan dan Pelatihan ASN	Diklat Pengembangan Teknis, Manajerial, dan Jabatan Fungsional	Orang	20.066	28.120	32.700	37.935	46.250	54.210	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional; kegiatan pengembangan kompetensi teknis Sub Kegiatan Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri, jumlah pengembangan kompetensi teknis, dan jumlah pengembangan kompetensi jabatan fungsional	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
3	Retret penyelarasan visi misi dan program Kepala daerah	Retret bagi seluruh Eselon II dan III lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Orang	437	-	-	-	-	-	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ; Sub Kegiatan Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah
		Pelatihan teknis untuk pemerintah desa	Orang	-	290	290	290	290	290	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis ; Sub Kegiatan Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum		

No	Program Daerah	*Rencana Aktivitas Riil*	Output	Target/Volume						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
4	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK dan KPK	Integrasi dalam kurikulum diklat/latnis	Dokumen	1	-	-	-	-	-	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ; Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional dan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	KPK RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Kinerja adalah keluaran/hasil yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur bagaiaman kinerja maka diperlukan ukuran-ukuran yang dapat menggambarkan keberhasilan dari kinerja itu sendiri atau dinamakan dengan indikator. Indikator dapat berupa indikator keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan diklat, utamanya pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai urusan tersebut telah dipilij indikator untuk mengukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. IKU BPSDMD merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada poin BAB III. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab IV ini poin 4.1. indikator kinerja ditampilkan dalam sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama			Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Kompetensi ASN		Indeks Kompetensi ASN	0	3.07	3.08	3.10	3.15	3.18	3.20	3.25	Indikator Tujuan
		Meningkatnya Daya Saing Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN	persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pengembangan Kompetensi	0	8.67	17.34	26.10	34.86	43.62	52.38	61.14	Indikator Sasaran
		Terpenuhinya Kebutuhan Sertifikasi	presentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama			Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kompetensi ASN										
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	72	73	74	75	76	77	78	Indikator Tujuan
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	80	80	80	80	80	80	80	80	Indikator Sasaran
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	0	3	3.05	2.89	2.92	2.94	2.96	2.98	Indikator Sasaran

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, sebagai panduan bagi pimpinan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan seluruh unit kerja yang ada dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pemerintahan. Rencana ini berisi tentang rencana program, kegiatan dan target kinerja dari implementasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil pemetaan dalam Renja PD Tahun 2025, kemudian Tahun 2026, 2027, 2028 serta 2029 yang berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil pemetaan *cascading* dan *desk* dengan pengampu.

Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan. Kondisi Lingkungan Strategis (Lingstra) mendorong terciptanya birokrasi yang semakin dinamis untuk mendukung pembangunan Indonesia (dengan memegang teguh nilai BerAKHLAK dalam melaksanakan tugasnya) yang berimbas pada penyesuaian arah kebijakan, strategi, prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Pengembangan Kompetensi ASN berperan mewujudkan Birokrasi berkelas dunia melalui SDM yang kompeten dan profesional memberikan pelayanan *excellent* kepada masyarakat melalui Pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan SDM Organisasi, melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan penjaminan mutu pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi melalui Jateng *Corporate University*, penguatan Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Sarana Prasarana pelatihan berbasis digital untuk mewujudkan *Techno Training Center* serta memberikan fasilitasi kepada *stakeholders* terkait untuk mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia.

Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunannya memperhatikan situasi, kondisi, dan potensi, serta memperhatikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan didukung sumber daya manusia yang potensial dan handal, Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berupaya mewujudkan mekanisme perencanaan yang akuntabel, transparan, dan konsisten berlandaskan komitmen yang telah dibangun dan disepakati. Mengingat perubahan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd. M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

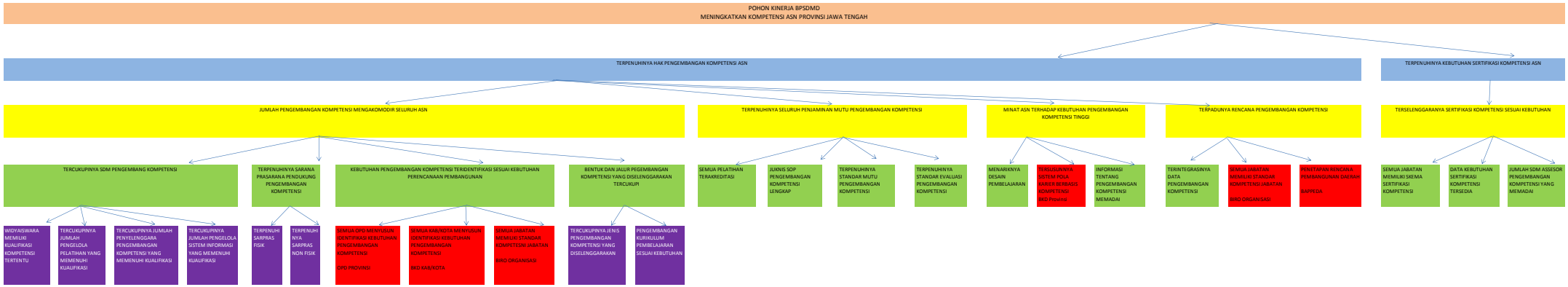

Keterangan :

: *Cross cutting* dengan pihak lain seperti OPD Provinsi, BKD/BKPSDM Kab/Kota, Biro Organisasi dan Bappeda

TUJUAN

MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN PROVINSI JAWA TENGAH

Indikator : Indeks Kompetensi ASN

SASARAN

MENINGKATNYA DAYA SAING KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA ASN

Indikator : Presentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya melalui Pengembangan Kompetensi

TERPENUHINYA KEBUTUHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN

Indikator : Presentase ASN yang tersertifikasi Kompetensi

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL	KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL	KABID SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENJAMINAN MUTU		KABID SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENJAMINAN MUTU
Indikator : Prosentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Bidang Kompetensi Teknis	*Indikator : Prosentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional*	*Indikator : Prosentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Bidang Manajerial*	*Indikator : Prosentase Perencanaan Bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan*		*Indikator : Prosentase ASN yang lulus Sertifikasi Kompetensi*
			Indikator : Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)(		
Pengembangan Kompetensi Teknis	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pengembangan Kompetensi Teknis	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Indikator : Jumlah Peserta Pengembangan Bidang Kompetensi Teknis	*Indikator : Jumlah Peserta Pengembangan Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional*	*Indikator : Jumlah Peserta Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial*	*Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi*	*Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi*	*Indikator : Jumlah Dokumen Sertifikasi Kompetensi*
			Indikator : Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi(	*Indikator : Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi*	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	**Penyusunan Kebijakan Teknis** dan **Rencana Sertifikasi Kompetensi**, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, **Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional**	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi **Teknis Umum, Inti, dan Pilihan** Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM	SUBBID PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL	SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	SUBBID PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	SUBBID PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	SUBBID SERTIFIKASI KOMPETENSI
Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	*Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional*	*Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS*	*Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan*	*Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan*	*Jumlah Kualifikasi Asessor kompetensi yang dimiliki*
SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI	SUBBID PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	*Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas*	*Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi*	*Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi*	*Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan*
			Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya		
Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	*Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional*	SUBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR	**Penyusunan Standar** Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi **Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional**	**Penyusunan Standar** Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi **Teknis umum, Inti, dan Pilihan** Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL	*Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator*	SUBBID PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	SUBBID PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	SUBBID SERTIFIKASI KOMPETENSI
Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	*Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional*	*Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama*	*Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan*	*Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan*	*Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi*
		SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	SUBBID PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	SUBBID PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	*Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan*	*Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan*	
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, **Pengelolaan Kelembagaan** dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi **Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan**	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi **Teknis umum, Inti, dan Pilihan** Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			SUBBID PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	SUBBID PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
			1,11111E+13	*Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan*	
			Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	*Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi*	
			Jumlah pelatihan yang diakreditasi		
			Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu		
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	**BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL**	**BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL**	**BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENJAMINAN MUTU**		

MATRIKS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

1. Sekretariat

No	Penetapan Konteks			Identifikasi Risiko							Analisis Risiko									Rencana tindak pengendalian			
								Dampak			Skala/Nilai Risiko yang			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko						
	Aktivitas	Manfaat	Pihak yang menerima manfaat dari aktivitas	Jenis Konteks Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Uraian Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Pemilik Risiko	Skala Probilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai (*Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	Skala Probilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Respons Risiko (*diisi menghindari risiko, mengurangi frekuensi dan/atau dampak risiko*)	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab (diisi sesuai jenis konteks risiko yang ada pada kolom 5 sebagai berikut : 1. Jika jenis konteks risiko yaitu sasaran strategis maka penanggungjawab setingkat Eselon II; 2. Jika jenis konteks risiko yaitu sasaran program maka penanggungjawab setingkat Eselon III/Koordinator; 3. Jika jenis konteks risiko	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Sosialisasi Program Pengembangan Kompetensi	Membangun sinergitas kegiatan Bangkom OPD, Kab Kota dan Mitra sehingga tercapai tujuan Bangkom	Mitra Bangkom dan BPSDMD	Sasaran Program	Risiko Operasional	Perubahan Regulasi Bangkom di instansi pembina	Bangkom tidak dilaksanakan sesuai perencanaan	Pengembangan Kompetensi di level Pemerintah Daerah kurang optimal	BPSDMD, Mitra Bangkom Kab/Kota, Jab Fungsional Tertentu	Sekretariat	3	3	9	Ada	memproses petunjuk teknis pelaksanaan jateng corpu dengan asumsi sebagai regulasi penguat di daerah dalam konteks pengembangan kompetensi ASN	Memadai	2	2	4	Mengurangi frekuensi keterjadian risiko	memantau progres capaian bangkom melalui integrasi database dengan OPD	sekretaris	Triwulan IV
2	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pemberian Penghargaan Bangkom	Mengukur dan menilai pelaksanaan Bangkom yang dilakukan OPD, Kab/Kota	Seluruh Mitra Bangkom dan BPSDMD	Sasaran Strategis	Risiko Kemitraan	OPD dan Kab/Kota tidak melaporkan penyelenggaraan bangkom	Tidak merataya informasi pelaksanaan bangkom yang dilakukan OPD dan Kab/Kota	BPSDMD sebagai lembaga Pelatihan Terakreditasi di Jawa tengah tidak dapat mengukur proses pelaksanaan Bangkom pada	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Kepala Perangkat Daerah	3	3	9	Ada	melalukan proses penjaminan mutu terhadap pelaksanaan bangkom di seluruh OPD	Memadai	2	2	4	Mengurangi dampak dari terjadinya risiko	memunculkan rapor pelaksanaan bangkom kepada pimpinan daerah	Kepala BPSDMD	Triwulan IV
3	Penyusunan Renja	Memiliki kerangka acuan kegiatan Bangkom sehingga terukur dan efektif	Mitra Bangkom dan BPSDMD	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Waktu penyusunan Renja bersamaan dengan waktu penyusunan Bangkom	Renja tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Bangkom	Renja belum menggambarkan seluruh bangkom yang dilaksanakan di tahun berjalan	BPSDMD	Sekretariat	4	3	12	Ada	memformulasikan bangkom sebagai komponen besar dalam pencapaian tujuan organisasi	Memadai	2	3	6	Mengurangi frekuensi keterjadian risiko	menjadi bangkom Jawa Tengah sebagai IKU daerah	Kepala BPSDMD	Triwulan IV
4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Mengetahui update realisasi pendapatan secara aktual	BPSDMD, Prov. Jateng	Sasaran Kegiatan	Risiko Fraud	Adanya manipulasi laporan atau pencatatan pendapatan/ retribusi oleh oknum	laporan pendapatan retribusi tidak sesuai dengan pendapatan riil yang diperoleh	kerugian pendapatan daerah dan temuan saat pengawasan	BPSDMD, Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	5	5	25	**sudah ada**	mengadakan konsolidasi /pencocokan data faktual dilapangan dengan pendapatan yang telah di transfer/diterima	**Memadai**	1	1	1	menghindari risiko	Pencocokan data(data faktual dan data penerimaan)dilaksanakan secara berkala sehingga tidak terjadi manipulasi laporan pendaptan	Kasubbag Umpeg dan Kasubbag Keuangan	Triwulan I
					Risiko Operasional	Kurangnya keterampilan petugas dalam pengelolaan retribusi	Petugas salah dalam menghitung atau memungut retribusi	kerugian pendapatan daerah dan temuan saat pengawasan	BPSDMD, Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	3	3	9	**sudah ada**	pembuatan leaflet/pamflet harga sewa sesuai denga Peraturan Gubernur tentang Indeks harga sewa	**Memadai**	1	1	1	menghindari risiko	harga sewa telah dipublikasikan di aplikasi E-sewa ,leaflet atau pamflet sehingga penyewa sudah tahu harga sewa sehingga tidak akan terjadi salah pungut	Kasubbag Umpeg dan Kasubbag Keuangan	Triwulan II
					Risiko Operasional	Terjadi ketidakmampuan pembayaran dari penyewa	Retribusi kurang atau gagal bayar	Pendapatan tidak sesuai target	BPSDMD, Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	3	3	9	**sudah ada**	pembuatan leaflet/pamflet harga sewa sesuai denga Peraturan Gubernur tentang Indeks harga sewa	**Memadai**	1	1	1	menghindari risiko	harga sewa telah dipublikasikan di aplikasi E-sewa ,leaflet atau pamflet sehingga penyewa sudah tahu harga sewa sehingga tidak akan terjadi ketidak mampuan pembayaran	Kasubbag Umpeg dan Kasubbag Keuangan	Triwulan I
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menjamin kepatuhan administrasi keuangan	Pegawai BPSDMD	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang sah dan aktual tidak lengkap	Pencairan SPJ kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Terganggunya pengelolaan anggaran	BPSDMD	Sekretariat	3	3	9	**sudah ada**	Adanya SOP pencairan spj didalamnya telah terinfokan syarat2 pencairan spj termasuk kelengkapan dokumen yang sah dan aktual	**Memadai**	1	1	1	menghindari risiko	SOP Bendahara Pengeluaran yang berisikan syarat- syarat pecairan selayaknya dapat dilaksanakan sehingga tidak terjadi kekurang lengkapan dokumen pencairan	Kasubbag Keuangan	Triwulan I
		Menjamin pelayanan kepegawaian untuk pegawai BPSDMD	Pegawai BPSDMD	Sasaran Program	Risiko Operasional	Kesalahan perhitungan gaji pegawai	Gaji pegawai kurang	Penundaan pembayaran gaji dan/atau revisi anggaran	BPSDMD	Sekretariat	3	3	9	**sudah ada**	pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi data berkala mengenai besaran gaji yang harus dibayarkan dengan subbag kepegawaian dan instansi pembina yaitu BKD	**Memadai**	1	1	1	menghindari risiko	pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi data berkala mengenai besaran gaji yang harus dibayarkan dengan subbag kepegawaian dan instansi pembina yaitu BKD sehingga tidak terjadi sala perhitungan gaji pegawai	Kasubbag Umpeg dan Kasubbag Keuangan	Triwulan I

6	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan tertib administasi barang milik daerah	BPSDMD	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Kurangnya pencatatan dan pengawasan barang	Terdapat barang milik daerah yang tidak terdata	Kehilangan barang	BPSDMD	Sekretariat	2	2	4	Ada	1. Pengawasan ketika serah terima barang 2. Pencatatan melalui aplikasi SIMASET 3. Pengisian kartu peminjaman barang 4. Adanya asuransi sebagai bentuk pengamanan	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	1. Inventarisasi berkala dan rekonsiliasi data untuk memastikan semua barang tercatat. 2. Penerapan sistem keamanan yang efektif untuk mencegah kehilangan barang.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
				Sasaran Strategis	Risiko Fraud	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah	Kerugian finansial perangkat daerah	BPSDMD	Kepada Perangkat Daerah	3	3	9	Ada	1. Adanya nota dinas permohonan pinjam ruang (bagi bidang-bidang) 2. Pengisian Kartu Peminjaman barang 3. Pengawasan BMD	Memadai	2	2	4	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	Penyusunan prosedur penggunaan barang milik daerah yang jelas dan transparan.	Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Triwulan IV
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan teritib administrasi kepegawaian perangkat daerah, Mencatat dan mengelola data	BPSDMD	Sasaran Strategis	Risiko Fraud	Manipulasi data pegawai untuk menguntungkan pihak tertentu	Terdapat perolehan tunjangan tidak sah	Kerugian keuangan dan reputasi perangkat daerah	BPSDMD	Kepada Perangkat Daerah			0						0				
				Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Ketidakteraturan data pegawai	Data kepegawaian tidak terbarui	Potensi kesalahan dalam penetapan hak kepegawaian	BPSDMD	Sekretariat			0						0				
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Memastikan kelancaran dan efektivitas operasional perangkat daerah	BPSDMD	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Ketidaktersediaan bahan logistik	Tamu tidak terfasilitasi dengan layak	Penurunan reputasi perangkat daerah	BPSDMD	Sekretariat	2	2	4	Ada	1. Perencanaan kebutuhan yang sesuai 2. Pemantauan dan pengawasan bahan logistik	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	1. Penyediaan fasilitas yang memadai bagi tamu dan penerapan standar pelayanan. 2. Evaluasi berkala terhadap efektivitas operasional administrasi umum.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Menunjang pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	BPSDMD	Sasaran Kegiatan	Risiko Fraud	Penyalahgunaan dana pengadaan	Barang yang diadakan tidak sesuai spesifikasi	Kerugian finansial perangkat daerah	BPSDMD	Sekretariat	3	2	6	Ada	1. Perencanaan pengadaan yang matang sesuai dengan kebutuhan 2. Pengecekan oleh PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) terhadap barang pengadaan	Memadai	2	1	2	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	1. Penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang transparan dan akuntabel. 2. Pengawasan yang ketat terhadap proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga serah terima barang	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
				Sasaran Kegiatan	Risiko Kepatuhan	Pengadaan tidak sesuai dengan regulasi	Barang tidak memenuhi standar administrasi	Potensi sanksi dan hambatan operasional	BPSDMD	Sekretariat	2	2	4	Ada	1. Perencanaan pengadaan yang matang sesuai kebutuhan dan regulasi 2. Pengecekan oleh PPHP terhadap barang pengadaan	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	1. Pelatihan bagi petugas pengadaan mengenai peraturan dan prosedur yang berlaku. 2. Penerapan sistem pengendalian internal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memastikan tersedianya layanan pendukung yang dibutuhkan perangkat daerah	BPSDMD	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Tidak ada pengawasan terhadap penggunaan listrik dan air	Penggunaan listrik dan air tidak efisien dan boros	Beban operasional meningkat	BPSDMD	Sekretariat	3	2	6	Ada	1. Sosialisasi hemat energi kepada seluruh pegawai 2. Kesadaran diri pribadi para pegawai 3. Pengawasan dan pemantauan melalui CCTV	Memadai	2	1	2	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	Penerapan program penghematan energi dan air dan pemantauan secara berkala	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
				Sasaran Kegiatan	Risiko Fraud	Mark-up pembayaran tagihan listrik, air, atau	Tagihan lebih tinggi dari penggunaan riil	Pemborosan anggaran dan potensi temuan	BPSDMD	Sekretariat	2	2	4	Ada	Pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi nil dan SPJ	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	Verifikasi tagihan listrik, air, dan komunikasi secara cermat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
				Sasaran Kegiatan	Risiko Kepatuhan	Honorarium tidak sesuai standar regulasi	Gaji honorer lebih rendah atau lebih tinggi dari ketentuan	Potensi pelanggaran hukum dan tuntutan tenaga honorer	BPSDMD	Sekretariat	2	2	4	Ada	Penetapan tarif honorarium berdasarkan pada peraturan yg berlaku	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	Pengawasan terhadap pembayaran honorarium untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset perangkat daerah untuk mendukung kelancaran	BPSDMD	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Tidak adanya jadwal pemeliharaan yang terstruktur untuk seluruh BMD	Barang milik daerah mengalami kerusakan	Anggaran meningkat akibat biaya perbaikan mendadak	BPSDMD	Sekretariat	3	2	6	Ada	Diilakukan penyusunan jadwal pemeliharaan terhadap kendaraan, bangunan dan gedung, serta sarana dan prasarana	Memadai	2	1	2	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	1. Penyusunan jadwal pemeliharaan yang terstruktur dan terdokumentasi.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV

				Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Pemeliharaan hanya dilakukan ketika barang sudah rusak berat	Barang menjadi tidak dapat digunakan	Efektivitas kerja perangkat daerah menurun	BPSDMD	Sekretariat	3	2	6	Ada	1. Penyusunan jdawal pemeliharaan 2. Fasilitasi Group Pojok Aduan sebagai sarana komunikasi aduan kerusakan 3. Pemeliharaan sesuai daftar prioritas dan urgensi	Memadai	2	1	2	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	1. Pelaksanaan pemeliharaan secara preventif 2. Penyediaan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan barang milik daerah.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
				Sasaran Kegiatan	Risiko Fraud	Penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Barang digunakan tanpa izin untuk keperluan di luar instansi	Kerugian finansial dan penyalahgunaan aset daerah	BPSDMD	Sekretariat	2	2	4	Ada	1. Pengisian kartu peminjaman barang 2. Pemantauan dan pengawasan	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	1. Penerapan sistem penggunaan barang milik daerah yang terkendali. 2. Pencatatan penggunaan barang milik daerah secara akurat dan transparan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
				Sasaran Kegiatan	Risiko Fraud	Pemalsuan laporan pemeliharaan barang	Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki	Kerugian keuangan	BPSDMD	Sekretariat	2	2	4	Ada	1. Pemantauan melalui Group Pojok Aduan terkait aduan kerusakan 2. Pemantauan dan pengawasan 3. Peran PPHP dalam mengecek pekerjaan pemeliharaan	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	1. Penggunaan sistem dokumentasi yang baik, dan benar. 2. Pengecekan ulang hasil pemeliharaan barang milik daerah.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV

2. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

No	Penetapan Konteks			Identifikasi Risiko							Analisis Risiko									Rencana tindak pengendalian			
								Dampak			Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah						
	Aktivitas	Manfaat	Pihak yang menerima manfaat dari aktivitas	Jenis Konteks Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Uraian Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Pemilik Risiko	Skala Probilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada *(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)*	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	Skala Probilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Respons Risiko *(diisi menghindari risiko, mengurangi frekuensi dan/atau dampak risiko)*	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab (diisi sesuai jenis konteks risiko yang ada pada kolom 5 sebagai berikut : 1. Jika jenis konteks risiko yaitu sasaran strategis maka penanggungjawab setingkat Eselon II; 2. Jika jenis konteks risiko	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Mendapatkan rekomendasi pengembangan kompetensi yang relevan dan efektif sesuai kebutuhan SDM Aparatur	Bidang Penyelenggara Pelatihan; Kab kota; SKPD	Sasaran Program	Risiko Operasional	Belum mempunyai Rencana Pengembangan Kompetensi di Masing-Masing Instansi	Usulan Pelatihan yang diusulkan ASN tidak semuanya Terakomodir dalam perencanaan pengembangan kompetensi di BPSDMD maupun di Masing masing OPD	1. Pengembangan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi 2. Kewajiban Kompetensi 20 JP belum menyeluruh ke Semua ASN	ASN Kab/Kota dan Provinsi Jateng	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	2	1	2	Ada	Melakukan sosialisasi identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi secara langsung ke OPD di Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Mitra Bangkom Kabupaten/Kota	Memadai	1	1	1	Menghindari terjadi risiko	1. Koordinasi yang lebih intens dengan PIC OPD dan Mitra Bangkom Kab/Kota 2. Menawarkan pelaksanaan bimtek analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pada OPD dan Mitra Bangkom Kab/Kota yang membutuhkan 3. Menawarkan pembuatan Modul Kurikulum ke OPD Terkait untuk pengembangan kompetensi di masing-masing instansi	Sub Koordinator P3TPK	Triwulan IV
2	Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Evaluasi Tenaga Pengajar yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan Mitra Bangkom Kabupaten/Kota	Mendapatkan saran, masukan, serta rekomendasi perbaikan pada penyelenggaraan pelatihan mendatang	Bidang Penyelenggara Pelatihan	Sasaran Kegiatan	Risiko Kepatuhan	Perubahan/pergantian tenaga pengajar tidak sesuai SOP Perubahan Pengajar sehingga nama pengajar tidak terinput dalam sistem	Peserta pelatihan tidak bisa menilai atau mengevaluasi pengajar yang sebenarnya	Tingkat ketercapaian mutu penyelenggaraan pelatihan di bawah capaian mutu	BPSDMD dan tenaga pengajar	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	2	2	4	Ada	Monitoring pelaksanaan SOP Perubahan Pengajar kepada pihak terkait	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	Evaluasi dan monitoring lebih lanjut pada pelaksanaan SOP Perubahan Pengajar secara berkala	1. Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Kerjasama 2. Ketua Kelompok Jabatan Widyaiswara	Triwulan IV
				Sasaran Kegiatan	Risiko Reputasi	Tidak ada tindak lanjut atas hasil evaluasi tenaga pengajar / penyelenggaraan pelatihan	Tenaga pengajar, Bidang Penyelenggara, serta pihak terkait kurang menindaklanjuti temuan	Turunnya indeks capaian mutu penyelenggaraan pelatihan	BPSDMD	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	2	2	4	Ada	Melakukan monitoring tindak lanjut dari Permintaan Tindakan Perbaikan yang sudah disepakati	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	Melaporkan Permintaan Tindakan Perbaikan sesegera mungkin kepada pihak terkait serta memonitoring tindak lanjutnya	Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Kerjasama	Triwulan IV
				Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Peserta bangkom tidak memberikan masukan dan kritik terhadap penyelenggara bangkom	Peserta bangkom menganggap evaluasi penyelenggaraan sebagai formalitas belaka	Tidak diperoleh data evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan bangkom	BPSDMD	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	2	1	2	Ada	Menyampaikan urgensi evaluasi penyelenggaraan di awal sesi sehingga peserta mendapatkan perspektif kebermanfaatan dari evaluasi penyelenggaraan	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi keterjadian risiko	Menambahkan kebermanfaatan serta urgensi evaluasi penyelenggaraan dalam paparan penjaminan mutu	Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Kerjasama	Triwulan II

3	Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi	Peningkatan kompetensi SDM aparatur	SDM aparatur Instansi Mitra (OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, OPD Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, maupun Instansi lain yang mengikuti kegiatan bangkom)	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi atau portofolio	Target peserta dalam suatu skema sertifikasi minimal tidak terpenuhi, sehingga kegiatan ditunda/tidak dapat dilaksanakan	Persyaratan dan atau kenaikan jenjang peserta sertifikasi tertunda / tidak tepat waktu	Peserta Sertifikasi & Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	1	2	2	Ada	Melakukan sosialisasi dan pendampingan peserta bersama dengan instansi pembina; untuk menyampaikan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi sebelum uji kompetensi dimulai	Memadai	1	1	1	Menghindari terjadi risiko	Penyampaian sosialisasi dan pendampingan yang diperlukan waktunya lebih awal, sehingga calon peserta memiliki waktu persiapan untuk memenuhi persyaratan dengan lebih baik	Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi	Triwulan IV

3. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

No	Penetapan Konteks			Identifikasi Risiko							Analisis Risiko									Rencana tindak pengendalian			
								Dampak			Skala/Nilai Risiko			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya			Respons Risiko (*diisi menghindari risiko, mengurangi frekuensi dan/atau dampak risiko*)	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab (diisi sesuai jenis konteks risiko yang ada pada kolom 5 sebagai berikut : 1. Jika jenis konteks risiko yaitu sasaran strategis maka penanggungjawab setingkat Eselon II; 2. Jika jenis konteks risiko yaitu sasaran program maka penanggungjawab setingkat Eselon III/Koordinator; 3. Jika jenis konteks	Target Waktu Penyelesaian
	Aktivitas	Manfaat	Pihak yang menerima manfaat dari aktivitas	Jenis Konteks Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Uraian Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Pemilik Risiko	Skala Probilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada (*Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi*)	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai (*Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	Skala Probilitas	Skala Dampak	Level Risiko				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	MOOC Tematik Kompetensi Teknis	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur	SDM aparatur Instansi Mitra (OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, OPD Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, maupun Instansi lain yang mengikuti kegiatan bangkom)	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Tidak adanya sistem pengingat (reminder) untuk menyelesaikan modul	Peserta pelatihan melalui MOOC tidak menyelesaikan pelatihan (*dropout* tinggi)	Tidak tercapainya target kelulusan peserta 100%	ASN Kab/Kota dan Provinsi Jateng & BPSDMD	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	2	2	4	Ada	Menyampaikan edaran dengan dilampiri alur serta panduan kegiatan yang jelas, guna menghimbau OPD Jateng dan BKD/ BKPP/ BKPSDM	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	Berkomunikasi melalui forum OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun forum OPD Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah yang	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Triwulan IV
				Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Peserta tidak memahami alur pelatihan menggunakan MOOC	Peserta pelatihan melalui MOOC tidak menyelesaikan pelatihan (*dropout*)	Tidak tercapainya target kelulusan peserta 100%	ASN Kab/Kota dan Provinsi Jateng & BPSDMD	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	2	1	2	Ada	Menyampaikan edaran dengan dilampiri alur serta panduan kegiatan yang jelas, guna menghimbau OPD Jateng dan BKD/ BKPP/	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	Berkomunikasi melalui forum OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun forum OPD Kabupaten/ Kota di Jawa	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Triwulan IV
				Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Bug/error dalam sistem MOOC	Adanya masalah teknis yang menghambat pembelajaran	Pelatihan melalui MOOC terganggu	ASN Kab/Kota dan Provinsi Jateng & BPSDMD	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	2	1	2	Ada	Menugaskan PIC sebagai pemantau LMS SINAUBAREN G untuk	Memadai	1	1	1	Menghindari terjadi risiko	Memantau LMS SINAUBAREN G untuk mengantisipasi	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Triwulan IV
2	Pelatihan Teknis (mencakup Pelatihan Bagi ASN Provinsi maupun ASN Kabupaten/ Kota melalui pola BIP)	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur	SDM aparatur Instansi Mitra (OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, OPD Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, maupun Instansi lain yang mengikuti kegiatan bangkom)	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Peserta pelatihan mendapatkan penugasan lain dari instansi pengirim	Peserta mengundurkan diri pada saat pelatihan telah berlangsung	Tidak tercapainya target kelulusan peserta 100%	ASN Kab/Kota dan Provinsi Jateng	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	1	2	2	Ada	Meminta OPD pengirim untuk mencarikan peserta pengganti	Memadai	1	1	1	Mengurangi dampak dari terjadinya risiko	Menghimbau kepada peserta agar selalu menginfokan apabila peserta berhalangan	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Triwulan IV
				Sasaran Kegiatan	Risiko Kemitraan	Adanya perbedaan antara program pelatihan yang diselenggarakan BPSDMD dengan prioritas	Jumlah calon peserta pelatihan tidak mencapai target kuota minimal	Pelatihan batal dilaksanakan	BPSDMD	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	2	2	4	Ada	Melakukan komunikasi intensif melalui forum OPD Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/	Memadai	1	1	1	Menghindari terjadi risiko	Melakukan analisis kebutuhan bangkom berbasis prioritas mitra (OPD Provinsi Jawa Tengah maupun	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Triwulan IV

3	Seminar / Workshop Tematik Kompetensi Teknis	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur	SDM aparatur Instansi Mitra (OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, OPD Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, maupun Instansi lain yang mengikuti kegiatan bangkom)	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Belum ada standar nilai minimal untuk pengukuran keberhasilan pembelajaran	Tidak diketahuinya efektivitas workshop/ seminar dalam pengembangan kompetensi	BPSDMD tidak dapat mengukur apakah peserta benar-benar memperoleh pengembanga	BPSDMD	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	2	1	2	Ada	Menerapkan aturan dan ketentuan yang mengikat, sehingga peserta tertib mengikuti kegiatan dan memperoleh	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi keterjadian risiko	Merancang struktur/alur dan aturan/ketentuan kegiatan yang dibakukan, sehingga mengikat	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Triwulan IV
					Risiko Operasional	Permintaan personel untuk menjadi fasilitator kurang spesifik atau terlalu mendadak	Kurangnya Kualitas Pengajar/Fasilitator eksternal	Efektivitas pelaksanaan pelatihan teknis menurun	ASN dan BPSDMD	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	1	2	2	Ada	Melibatkan stakeholders yang berkompeten sebagai fasilitator meskipun harus mengambil dari	Memadai	1	1	1	Menghindari terjadi risiko	Berkonsultasi dengan instansi pembina/ instansi yang berkecimpung pada ranah yang relevan dengan tema	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Triwulan IV

4. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

No	Penetapan Konteks			Identifikasi Risiko							Analisis Risiko									Rencana tindak pengendalian			
								Dampak			Skala/Nilai Risiko yang			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko						
	Aktivitas	**Manfaat**	**Pihak yang menerima manfaat dari aktivitas**	**Jenis Konteks Risiko**	**Kategori Risiko**	**Sebab**	**Uraian Risiko**	**Uraian**	**Pihak yang Terkena**	**Pemilik Risiko**	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Belum Ada/Ada** *(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)*	**Uraian Pengendalian**	**Belum Memadai/Memadai** *(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)*	**Skala Probilitas**	**Skala Dampak**	**Level Risiko**	**Respons Risiko** *(diisi menghindari risiko, mengurangi frekuensi dan/atau dampak risiko)*	**Rencana Tindak Pengendalian**	**Penanggung Jawab** (diisi sesuai jenis konteks risiko yang ada pada kolom 5 sebagai berikut : 1. Jika jenis konteks risiko yaitu sasaran strategis maka penanggungjawab setingkat Eselon II;	**Target Waktu Penyelesaian**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**	**(17)**	**(18)**	**(19)**	**(20)**	**(21)**	**(22)**	**(23)**	**(24)**
1	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	Terpenuhinya kewajiban pengembangan kompetensi ASN	SDM aparatur Instansi Mitra (OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, OPD Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, maupun Instansi lain yang mengikuti kegiatan bangkom)	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Adanya perubahan regulasi terkait pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional	Adanya perubahan Jadwal dan jenis pelatihan	Turunnya motivasi dan kepuasan peserta pelatihan	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, intansi pengirim	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	2	2	4	Ada	**Penjadwalan ulang pelatihan sesuai dengan kalender akademik instansi pembina atau regulasi yang baru**	Memadai	2	2	4	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	berkoordinasi dengan instansi pembina JF terkait regulasi yg baru dan menjadwal ulang pelatihan	Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional	Triwulan I
				Sasaran Kegiatan	Risiko Kemitraan	Adanya perbedaan prioritas kebutuhan pengemban	Target peserta tidak terpenuhi	Berkurangnya motivasi peserta pelatihan	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, intansi	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan	1	1	1	Ada	Pemilihan jenis pelatihan disesuaikan dg permintaan kebutuhan pengguna		1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	berkoordinasi dg instansi mitra	Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional	Triwulan II
2	Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional	Terpenuhinya kewajiban pengembangan kompetensi ASN	SDM aparatur Instansi Mitra (OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, OPD Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, maupun Instansi lain yang mengikuti kegiatan bangkom)	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Adanya perubahan regulasi terkait pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional	Adanya perubahan Jadwal dan jenis pelatihan	Turunnya motivasi dan kepuasan peserta pelatihan	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, intansi pengirim	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	2	2	4	Ada	**Penjadwalan ulang pelatihan sesuai dengan kalender akademik instansi pembina atau regulasi yang baru**	Memadai	2	2	4	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	berkoordinasi dengan instansi pembina JF terkait regulasi yg baru dan menjadwal ulang pelatihan	Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional	Triwulan I
				Sasaran Kegiatan	Risiko Kemitraan	Adanya perbedaan prioritas kebutuhan pengemban	Target peserta tidak terpenuhi	Berkurangnya motivasi peserta pelatihan	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, intansi	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan	1	1	1	Ada	Pemilihan jenis pelatihan disesuaikan dg permintaan kebutuhan pengguna		1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	berkoordinasi dg instansi mitra	Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional	Triwulan II
3	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	Terpenuhinya kewajiban pengembangan kompetensi ASN	SDM aparatur Instansi Mitra (OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, OPD Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, maupun Instansi lain yang mengikuti kegiatan bangkom)	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Belum ada standar nilai minimal untuk pengukuran keberhasilan pembelajaran	Tidak diketahuinya efektivitas workshop/ seminar dalam pengembangan kompetensi	BPSDMD tidak dapat mengukur apakah peserta benar-benar memperoleh pengembangan	BPSDMD	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	2	2	4	Ada	Pembuatan standar monitoring dan evaluasi peserta setelah pelatihan	Memadai	2	2	4	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	berkoordinasi dg pihak penjamin mutu untuk menyiapkan bahan evaluasi	Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional	Triwulan I
				Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Permintaan personel untuk menjadi fasilitator	Kurangnya Kualitas Pengajar/Fasilitator eksternal	Efektivitas pelaksanaan pelatihan fungsional menurun	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, intansi	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan	1	1	1	Ada	Pelaksanaan pelatihan bagi fasilitator untuk meningkatkan kompetensi	Memadai	1	1	1	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	berkoordinasi dengan instansi pembina JF terkait pelaksanaan pelatihan bagi	Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional	Triwulan III

5.Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri

No	Penetapan Konteks			Identifikasi Risiko							Analisis Risiko									Rencana tindak pengendalian			
								Dampak			Skala/Nilai Risiko yang			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko			Respons Risiko (*diisi menghindari risiko, mengurangi frekuensi dan/atau*	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab (diisi sesuai jenis konteks risiko yang ada pada kolom 5 sebagai berikut :	Target Waktu Penyelesaian
	Aktivitas	Manfaat	Pihak yang menerima manfaat dari aktivitas	Jenis Konteks Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Uraian Risiko	Uraian	Pihak yang Terkena	Pemilik Risiko	Skala Probilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada (*Apakah sudah terdapa*	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai (*Apakah uraian*	Skala Probilitas	Skala Dampak	Level Risiko				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD	Anggota DPRD memahami secara mendalam tentang fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, serta regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas anggota DPRD Kabupaten/kota	Anggota DPRD Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, Instansi Pengirim/ Mitra Bangkom	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Ketidakpahaman akan manfaat pembelajaran, motivasi rendah, mudah merasa bosan, metode pembelajaran yang monoton	Kurangnya partisipasi aktif peserta dalam mengikuti serangkaian pembelajaran	Tujuan pembelajaran yang tidak tercapai secara optimal	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Peserta kegiatan, Intansi Pengirim/Mitra Bangkom	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	3	3	9	Ada	Penggunaan metode pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, bermain peran (role play), pengintegrasian teknologi, dan atau penerapan pembelajaran Problem-Based Learning	Memadai	2	2	4	Mengurangi frekuensi keterjadian risiko	Merencanakan dan merancang desain pembelajaran, memastikan sumber daya/ pemateri memadai, mengawasi dan memantau dan mengevaluasi pembelajaran, evaluasi	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Triwulan IV
		Anggota DPRD memahami secara mendalam tentang fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, serta regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas anggota DPRD Kabupaten/kota	Anggota DPRD Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, Instansi Pengirim/ Mitra Bangkom	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Peserta kurang menyadari pentingnya mematuhi jadwal yang telah ditetapkan, sehingga mereka tidak memprioritaskan ketepatan waktu	Adanya pergeseran waktu dari jadwal yang telah ditetapkan	Situasi pembelajaran menjadi kurang kondusif	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Peserta kegiatan, Intansi Pengirim/Mitra Bangkom	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	3	3	9	Ada	Edukasi tentang pentingnya disiplin waktu, pemantauan dan evaluasi berkala	Memadai	2	2	4	Mengurangi frekuensi keterjadian risiko	Adanya petugas di kelas yang memantau, mengawasi dan memastikan jalannya kegiatan agar sesuai jadwal, moderator menginformasikan dan mengingatkan rincian kegiatan sebelum pembelajaran, koordinasi dengan Instansi Pengirim yang mendampingi peserta	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Triwulan III
2	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur terutama bagi talenta terbaik yang telah dipetakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja	Kader Potensial Pemprov Jawa Tengah dan ASN Provinsi Jawa Tengah	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Peserta pelatihan mendapatkan penugasan lain dari instansi pengirim	Peserta mengundurkan diri pada saat pelatihan telah berlangsung	Tidak tercapainya target kelulusan peserta 100%	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Intansi Pengirim/Mitra Bangkom	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	3	3	9	Ada	Melakukan komunikasi efektif melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan di tingkat Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah yang mengirimkan peserta	Memadai	2	2	4	Mengurangi frekuensi keterjadian risiko	*Follow-up*/ instansi pengirim untuk memastikan bahwa informasi penyelenggaraan kegiatan yang disampaikan telah diterima, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik sehingga penyelenggaraan dapat dilaksanakan sesuai rencana	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Triwulan IV
				Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Jadwal yang bertabrakan dengan komitmen lain yang dimiliki oleh narasumber	Adanya potensi pergantian narasumber eksternal dalam kegiatan seminar online	Adanya perubahan narasumber	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Peserta Kegiatan, Intansi Pengirim/Mitra Bangkom	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	3	3	9	Ada	Koordinasi Intensif terkait penjadwalan dengan narasumber dan instansi asal narasumber, penyediaan alternatif narasumber	Memadai	2	2	4	Mengurangi frekuensi keterjadian risiko	Instansi asal narasumber diminta memastikan kehadiran narasumber maksimal H-3 dan diminta menyediakan alternatif narasumber pengganti	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Triwulan IV

3	Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Prajabatan	Terpenuhinya standar Kompetensi manajerial Jabatan Struktural dan standar kompetensi CPNS	Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Prajabatan, Instansi Pengirim/ Mitra Bangkom	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Ketidaksesuaian jadwal dengan kegiatan pribadi atau pekerjaan, penugasan oleh pimpinan instansi bersangkutan, dan atau alasan kesehatan	Adanya potensi pengunduran diri peserta pelatihan	Tidak tercapainya target peserta 100%	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Intansi Pengirim/Mitra Bangkom	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	3	4	12	Ada	Melakukan komunikasi efektif melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan di tingkat Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah yang mengirimkan peserta	Memadai	2	3	6	Mengurangi frekuensi keterjadian risiko	Melakukan desk identifikasi dan validasi peserta sebelum penyelenggaraan pelatihan dimulai, melakukan rapat koordinasi bagi penyelenggaraan pelatihan pola Biaya Instansi Pengirim	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Triwulan I
			Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Prajabatan, Instansi Pengirim/ Mitra Bangkom	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Jadwal yang bertabrakan dengan komitmen lain yang dimiliki oleh narasumber	Adanya potensi pergantian narasumber dalam kegiatan pelatihan, adanya potensi perubahan jadwal kegiatan	Pergeseran kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Peserta Pelatihan, Intansi Pengirim/Mitra Bangkom	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	3	3	9	Ada	Merencanakan jadwal dengan cermat, melakukan koordinasi yang baik dengan narasumber sebelum pelatihan dimulai, serta memiliki rencana alternatif untuk mengantisipasi keterlambatan atau perubahan jadwal.	Memadai	2	2	4	Mengurangi frekuensi keterjadian risiko	Penyusunan jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan *schedule* narasumber, menyediaakan beberapa alternatif narasumber sebelum kegiatan dimulai	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Triwulan IV
			Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Prajabatan, Instansi Pengirim/ Mitra Bangkom	Sasaran Kegiatan	Risiko Operasional	Perubahan kurikulum pembelajaran	Adanya perubahan kebijakan dan regulasi, adanya potensi perubahan jadwal kegiatan	Pergeseran kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Peserta Pelatihan, Intansi Pengirim/Mitra Bangkom	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	3	3	9	Ada	Koordinasi intensif dengan LAN RI	Memadai	2	2	4	Mengurangi frekuensi keterjadian risiko	mensosialisasikan regulasi kepada Instansi pengirim	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Triwulan IV

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, menciptakan kerukunan sosial, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara, Kesbangpol menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika global dan nasional. Kesbangpol memiliki tugas untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi perlu diperkuat, baik melalui kegiatan sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama dalam bidang media sosial dan digital, Kesbangpol dihadapkan pada tantangan baru dalam mengelola informasi dan mencegah penyebaran hoaks yang dapat memicu ketegangan sosial. Seiring dengan dinamika politik nasional dan lokal yang berkembang cepat, tantangan yang dihadapi oleh Kesbangpol semakin kompleks. Fenomena seperti polarisasi sosial, perbedaan politik yang tajam, serta ancaman terhadap kerukunan sosial, menjadi tantangan utama yang perlu dihadapi untuk menjaga stabilitas daerah.

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga stabilitas politik di dalam negeri. Aspek pembangunan ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi dasar negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fokus utama dari pembangunan di bidang ini adalah pengembangan sistem politik yang demokratis, yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan memastikan terciptanya tatanan pemerintahan yang stabil serta inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan perencanaan yang matang agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan tepat, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mengatur bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan prosedur yang digunakan untuk menyusun berbagai rencana pembangunan, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan, yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Proses perencanaan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat dan aspirasi masyarakat.

Seiring dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi dan pemberian otonomi daerah, setiap daerah diberikan hak dan kewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan mereka sendiri. Pembangunan daerah ini, meskipun disusun secara terpisah, tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah adalah sub-sistem dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional, yang memiliki hubungan erat dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar di tingkat nasional.

Sejalan dengan regulasi yang ada, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, serta peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 yang mengatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tetap berfungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Gubernur Jawa Tengah. Badan Kesbangpol memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang akan tetap berlaku sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum.

Untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik, diperlukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Penyesuaian

ini penting untuk menyesuaikan indikator dan target pembangunan dalam periode lima tahun (2025-2029), agar program yang dilaksanakan dapat lebih efektif, relevan, dan sejalan dengan perubahan regulasi yang ada. Dengan demikian, penyesuaian Renstra Badan Kesbangpol ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah tetap selaras dengan tujuan nasional serta kebutuhan masyarakat setempat. Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 terhadap RPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026.

Sebagai salah satu perangkat daerah, maka Badan Kesbangpol perlu untuk menyusun Renstra. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif hal ini sesuai amanat dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan penyelarasan dan penyesuaian target kinerja, maka Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada berbagai rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menghasilkan sinergi program yang dapat berdampak luas terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan.

Upaya tersebut merupakan implementasi nyata dari Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah, yaitu: “**Terwujudnya sebuah provinsi yang maju, berwibawa, dan berkelanjutan, dengan semangat kolaboratif dan responsif, sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045**”, dengan prinsip "**Ngopeni – Ngelakoni Jateng**". Ini juga mencerminkan pokok-pokok pikiran dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah, khususnya misi ketiga, yaitu: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas**, serta misi kelima, yaitu: **Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan**

warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia yang berkeadilan. Untuk mewujudkannya, penyelenggaraan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Jawa Tengah perlu selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini juga sejalan dengan penyesuaian dan pengembangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, serta mendukung Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri 2025-2029. Selain itu, pembangunan ini perlu mendukung visi jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
    Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

42. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2025-2029;
43. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 0007/0001565 tanggal 26 Februari 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 -2029;
44. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7.2.2/0002764 tanggal 9 April 2025 tentang Penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) dan Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daeah dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mewujudkan visi kepala daerah yaitu "**Terwujudnya sebuah provinsi yang maju, berwibawa, dan berkelanjutan, dengan semangat kolaboratif dan responsif, sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045**"
2. Mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah di urusan pemerintahan umum dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Sistematika Penyusunan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra); Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan Sistematika Penulisan.

Bab II **Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah; Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaah Renstra K/L; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS; serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab III **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebiajkan**

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang disertai dengan indikator kinerja targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan; Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melalui metode analisis SWOT yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab IV **Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya, sehingga penentuan program dan kegiatan harus

selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, Indikator Kinerja Perangkat Daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat Daerah. Selain IKU Perangkat Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program.

Bab V **Penutup**

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan, yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai perubahan atas peraturan tersebut. Peraturan tersebut menetapkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) tetap berfungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah Gubernur Jawa Tengah, dengan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Ketentuan ini berlaku sampai adanya peraturan perundang-undangan baru terkait pelaksanaan pemerintahan umum.

2.1.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. Membina, memfasilitasi, dan melaksanakan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, serta politik dalam negeri di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
e. Menyelenggarakan kesekretariatan badan;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menetapkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1) Subbagian Program;
    2) Subbagian Keuangan;
    3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
e. Bidang Politik Dalam Negeri
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tersaji pada gambar berikut:

Table 1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Jawa Tengah

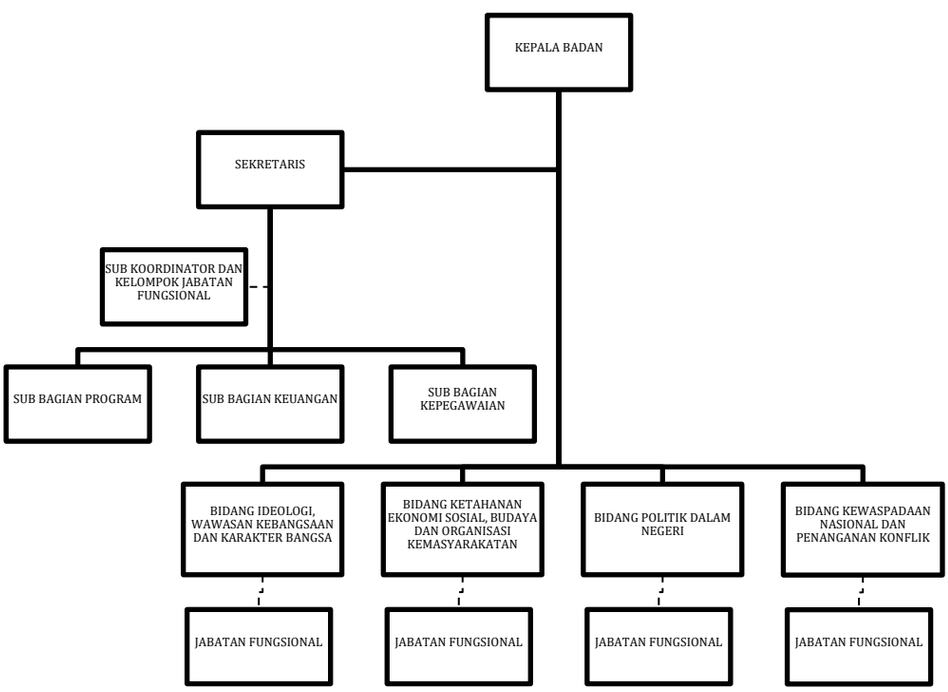

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.1.3 Fungsi Organisasi dalam Perangkat Daerah

Adapun penjelasan mengenai tugas dan fungsi pada masing-masing perangkat yang ada dalam Kesbangpol Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. **Sekretariat**

   Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

   a. Tugas:

      Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

   b. Fungsi:

      1) Penyiapan bahan koordinasi di lingkungan Badan;
      2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
      3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Badan;
      4) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi serta tata laksana di lingkungan Badan;
      5) Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
      6) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;

7) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat membawahkan:

1) Sub Bagian Program

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan.

2) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Badan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Badan.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karekter Bangsa

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

b. Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
2) Pelaksanaan kebijakan terkait pembumian nilai-nilai Pancasila, pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme, aktualisasi dan implementasi nasionalisme/ patriotisme, pendataan dan pendalaman perkembangan ideologi/kelompok radikal, pembangunan karakter dan penguatan ideologi Pancasila, pembentukan Paskibraka;
3) Monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
4) Pelaporan dan rekomendasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas:

Melakukan persiapan untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

b. Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;

2) Pelaksanaan kebijakan terkait pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pencegahan narkotika, pembinaan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan, nguri-nguri budaya guna ketahanan bangsa, pemberdayaan ormas, pendayagunaan potensi ormas, pembahasan isu-isu strategis bidang ormas;
3) Monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,dan organisasi kemasyarakatan;
4) Pelaporan dan rekomendasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik dan Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.

b. Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri;
2) Pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan dan penguatan peran politik, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wasbang dan ideologi negara, peningkatan koordinasi dan komunikasi politik, penguatan sistem implementasi pemilu/pilkada dan masyarakat desa, penguatan keterbukaan media/pers dalam mendukung keterbukaan

demokrasi, pendidikan politik, sekolah politik kebangsaan, penguatan kemitraan pengembangan demokrasi, penguatan perkembangan politik daerah, penguatan sistem implementasi kelembagaan politik, penguatan keterbukaan partai politik;

3) Koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang politik dalam negeri;
4) Monitoring dan evaluasi di bidang bidang politik dalam negeri;
5) Pelaporan dan rekomendasi di bidang bidang politik dalam negeri;
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

b. Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
2) Pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini, peningkatan kapasitas di bidang kewaspadaan dan deteksi dini, pengamanan VIP/VVIP, pengawasan orang asing, penguatan ruang publik, pengamanan aksi unjuk rasa, penanganan konflik sosial, dan pelaksanaan Tim Kewaspadaan DiniKoordinasi dengan unit kerja terkait di bidang politik dalam negeri;

3) Koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
4) Monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
5) Pelaporan dan rekomendasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

A) Jumlah dan Status Kepegawaian

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kehidupan berbangsa di wilayahnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan terorganisir dengan baik di berbagai bidang operasional. Dalam laporan bulan April 2025, disajikan rincian jumlah dan distribusi pegawai yang mencerminkan prioritas kerja dan kebutuhan organisasi, dengan komposisi sebagai berikut:

Table 2 Rincian Pegawai Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bulan April 2025

Nomor	Bidang dan Bagian	Jumlah (Orang)
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Sub Bagian Program	4
4	Sub Bagian Keuangan	8
5	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
6	Kepada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan	1
7	Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	6
8	Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional	4
9	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa	1
10	Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	2

11	Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan	6
12	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	0
13	Sub Koordinator Sistem, Implementasi, dan Kelembagaan Politik	3
14	Sub Koordinator Pemilu, Pendidikan, dan Budaya Politik	4
	Jumlah	49

Sumber: Kesbangpol, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1, jumlah total pegawai yang mendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada bulan April 2025 adalah sebanyak 49 orang. Jumlah ini mencakup berbagai bidang dan bagian yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan tersebut. Komposisi ini terdiri dari pegawai yang tersebar dalam 14 bidang dan bagian, dengan jumlah pegawai yang bervariasi pada setiap bagian sesuai dengan kebutuhan operasional.

Bagian dengan jumlah pegawai terbanyak adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan yang memiliki 8 pegawai. Hal ini menunjukkan pentingnya fungsi administratif dan pengelolaan sumber daya manusia dalam mendukung kinerja keseluruhan badan. Sementara itu, yang berperan penting dalam pengelolaan anggaran dan keuangan organisasi. Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan juga memiliki peran signifikan dengan jumlah pegawai sebanyak 6 orang, mengindikasikan perhatian terhadap aspek wawasan kebangsaan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, beberapa bagian memiliki jumlah pegawai yang lebih sedikit tetapi tetap memegang peran strategis. Misalnya, Sub Bagian Program hanya memiliki 4 pegawai, namun bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengelolaan program kerja badan. Bagian lain seperti Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional, Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, serta Sub Koordinator Sistem, Implementasi, dan Kelembagaan Politik masing-masing memiliki jumlah pegawai yang cukup untuk mendukung fokus kerja di bidangnya. Dengan struktur ini, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal.

Dengan pembagian tugas yang terstruktur ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki kapasitas untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketahanan bangsa. Dukungan dari pegawai yang kompeten dan berkualitas menjadi kunci dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk peningkatan kesadaran politik masyarakat dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

B) Status Pendidikan dan Golongan

Tingkat pendidikan pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menunjukkan mayoritas memiliki latar belakang pendidikan sebanyak 12 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), Strata 1 (Sarjana), yaitu sebanyak 23 orang. Selanjutnya, menunjukkan adanya tingkat kompetensi dan keahlian yang lebih tinggi di beberapa posisi strategis. Selain itu, terdapat 4 orang lulusan Akademi/D3 dan 10 orang lulusan SLTA, yang berkontribusi pada peran-peran teknis dan administratif dalam organisasi, sebagaimana yang ditunjukan pada table berikut:

Table 3 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Status Pendidikan bulan April 2025

Nomor	Status Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	12
2	Strata 1	23
3	Akademi/ D3	4
4	SLTA	10
	Jumlah	49

Sumber: Kesbangpol, 2025

Table 4 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Golongan bulan April 2025

Nomor	Status Pendidikan	Jumlah
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	33
3	Golongan II	7

4	PPPK	3
5	Golongan	-
	Jumlah	49

Sumber: Kesbangpol, 2025

Tabel 3 memperlihatkan distribusi pegawai berdasarkan golongan kepegawaian. Dari total 49 pegawai, sebagian besar berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 33 orang. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada posisi menengah dalam struktur kepegawaian, yang umumnya diisi oleh individu dengan pengalaman kerja dan kompetensi profesional yang signifikan. Sementara itu, Golongan IV memiliki 6 orang pegawai, yang biasanya mencerminkan jabatan struktural dengan tanggung jawab yang lebih besar. Golongan II juga mencatat jumlah yang sama, yaitu 7 orang, 3 orang PPPK sedangkan tidak ada pegawai di Golongan I.

Kombinasi antara tingkat pendidikan dan golongan kepegawaian ini mencerminkan struktur organisasi yang relatif seimbang, dengan distribusi sumber daya manusia yang mencakup berbagai tingkatan keahlian dan tanggung jawab. Keberadaan pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi, terutama pada golongan yang lebih senior, memberikan nilai tambah dalam upaya badan ini untuk melaksanakan fungsi strategisnya.

2.2.2. Sarana dan Prasarana OPD

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari:

Table 5 Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bulan Februari 2025

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun 2025	
		Jumlah	Nilai
A	TANAH		
1	Tanah	3	12.011.143.000
B	PERALATAN MESIN		

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun 2025	
		Jumlah	Nilai
2	Alat-Alat Besar	2	689.909.226
3	Alat-Alat Angkut	20	3.084.658.400
4	Alat-Alat Bengkel	-	-
5	Alat-Alat Pertanian	-	-
6	Alat Kantor dan RT	658	3.782.499.000
7	Alat Studio & Komunikasi	101	699.001.000
8	Alat Komputer	203	1.861.130.124
9	Alat Laboratorium	-	-
10	Alat Keamanan	-	-
C	GEDUNG DAN BANGUNAN		
11	Bangunan Gedung	6	6.819.580.081
12	Bangunan Monumen	-	-
D	JALAN, IRIGASI & JARINGAN		
13	Jalan Jembatan	-	-
14	Bangunan Air/ Irigasi	-	-
15	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	3	131.650.000
16	Instalasi	-	-
17	Jaringan	-	-
E	ASET TETAP LAINNYA		
18	Buku Perpustakaan	1.061	80.619.400
19	Barang Bercorak Kesenian/Budaya	-	-
20	Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-
F	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		
21	Bangunan Gedung	-	-
22	Bangunan Monumen	-	-
	TOTAL	2057	29.160.077.734

Sumber: Kesbangpol, 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 mencerminkan kesiapan lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Dalam tabel tersebut, terlihat bahwa kategori aset yang paling banyak adalah alat kantor dan rumah tangga, dengan jumlah mencapai 658 unit, senilai Rp.3.782.499.000. Hal ini menunjukkan fokus lembaga pada pemenuhan kebutuhan administrasi dan operasional sehari-hari untuk mendukung kelancaran tugas-tugas birokrasi. Selain itu, alat komputer dengan jumlah 203 unit juga mencerminkan upaya Kesbangpol dalam mendigitalisasi layanan dan administrasi.

Fokus pada peralatan mesin seperti alat-alat besar dan alat-alat angkut, meskipun jumlahnya terbatas, menunjukkan adanya dukungan logistik untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagai contoh, 20 unit alat angkut dengan nilai Rp.3.084.658.500 dapat digunakan untuk mobilitas kegiatan lapangan, termasuk pengawasan, monitoring, dan koordinasi antar wilayah. Namun, terdapat kekurangan pada kategori alat-alat bengkel, pertanian, dan keamanan, yang bisa menjadi perhatian untuk pengembangan sarana di masa mendatang agar mendukung fungsi yang lebih luas.

Selain itu, keberadaan bangunan gedung yang bernilai Rp.6.819.580.081 menegaskan pentingnya infrastruktur fisik sebagai pusat koordinasi dan aktivitas lembaga. Namun, tidak ada data terkait jalan, irigasi, ataupun instalasi yang dapat mendukung aksesibilitas lebih lanjut. Oleh karena itu, meskipun total nilai aset mencapai Rp.29.160.077.734 dengan total 2.057 item, Kesbangpol perlu mempertimbangkan investasi di bidang infrastruktur dasar dan aset lain yang lebih spesifik untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dievaluasi berdasarkan tiga aspek utama, yaitu stabilitas wilayah, politik dan demokrasi, serta keharmonisan antar umat beragama yang melibatkan pembinaan terhadap organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kepemudaan (OKP). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

A) Konduktivitas Wilayah

Secara keseluruhan, situasi di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021-2025 tetap aman dan kondusif. Namun, beberapa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti aksi unjuk rasa dan tindak pidana, masih terjadi. Jumlah kejadian unjuk rasa menunjukkan fluktuasi sepanjang tahun 2021 hingga 2025.

Dalam kurun waktu 2021–2025, Jawa Tengah menghadapi sejumlah isu strategis yang memicu dinamika sosial-politik berupa aksi unjuk rasa dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Pertama, kasus Desa Wadas, Purworejo, yang sejak 2013 menolak rencana penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Penolakan masyarakat dilatarbelakangi kekhawatiran kerusakan lingkungan, hilangnya lahan pertanian, serta dampak sosial. Aksi unjuk rasa sempat memuncak pada 8 Februari 2022 ketika pengukuran lahan oleh BPN berujung penangkapan 63 warga. Hingga 2023, meskipun pembebasan lahan telah mencapai 97,2%, sebagian masyarakat masih menolak sekitar 124 hektar lahan tambang. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena mencerminkan tarik-menarik antara kepentingan pembangunan infrastruktur dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal.

Kedua, pada peringatan May Day tahun 2025, tercatat sekitar 18.950 buruh melakukan aksi di lebih dari 9 titik formal dan puluhan titik lain di kabupaten/kota Jawa Tengah. Aksi berjalan relatif kondusif dengan pengamanan ribuan personel kepolisian, namun di Kota Semarang terjadi kericuhan akibat kelompok anarko yang menyusup dan melakukan perusakan. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka. Tuntutan buruh umumnya menyangkut isu outsourcing, PHK, kebutuhan perlindungan pekerja melalui regulasi (termasuk RUU PPRT), serta peningkatan kesejahteraan.

Ketiga, pada tahun 2025, DPRD Jawa Tengah menjadi sorotan aksi mahasiswa dan masyarakat sipil terkait tuntutan keadilan, kekerasan aparat, serta kebijakan yang dianggap kurang berpihak kepada publik. Aksi besar di Semarang pada akhir Agustus berujung kericuhan dengan pembakaran dan perusakan kendaraan. Massa menyoroti kasus kematian driver ojek online, ketidakadilan hukum, dan kekerasan aparat. Sebagai tindak lanjut, mahasiswa menggelar audiensi terbuka dengan pimpinan DPRD Jawa Tengah pada awal September dan menyampaikan 10 tuntutan, termasuk pembebasan massa yang ditahan, pembahasan RUU Perampasan Aset, serta evaluasi aparat penegak hukum. Aksi serupa juga terjadi di Kabupaten Batang, yang berujung pada kerusakan kantor DPRD setempat dan penanganan melalui jalur hukum.

Keempat, pada tahun 2025, terjadi aksi unjuk rasa besar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diorganisir oleh Aliansi

Masyarakat Pati Bersatu. Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%, yang dianggap sangat membebani warga. Unjuk rasa di Kabupaten Pati menjadi salah satu aksi publik yang paling menonjol di Jawa Tengah pada periode 2025 karena:

- jumlah massa yang sangat besar
- tuntutan yang meluas tidak hanya soal pajak tetapi juga kepemimpinan dan kebijakan lokal lainnya
- eskalasi cepat dari aksi tertib menjadi ricuh
- dampaknya langsung: pembatalan kebijakan dan pengusutan resmi melalui DPRD

Keempat isu tersebut menunjukkan bahwa dinamika unjuk rasa di Jawa Tengah erat kaitannya dengan persoalan pembangunan strategis, kebijakan fiskal, perlindungan hak masyarakat, ketenagakerjaan, serta akuntabilitas lembaga publik, yang kesemuanya penting untuk dicermati dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Table 6 Frekuensi Unjuk Rasa di Jawa Tengah Menurut Kelompok Pengunjuk Rasa

No	Kelompok Massa	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mahasiswa	42	36	48	34	45
2	Buruh	100	44	42	64	38
3	Warga Desa	40	49	22	33	6
4	PNS	0	4	1	0	0
5	Masyarakat Umum	42	16	82	115	15
6	Parpol/ Ormas	133	63	56	87	52
	Jumlah	357	212	251	333	156

Sumber: Kesbangpol Jateng, 2025

Jumlah aksi unjuk rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Puncak frekuensi terjadi pada tahun 2020 dengan total 357 aksi, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai isu sosial-ekonomi dan politik pada masa tersebut, termasuk dampak pandemi COVID-19. Penurunan drastis terlihat pada tahun 2021 dengan hanya 212 aksi, yang

dapat dikaitkan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau kebijakan sejenis yang membatasi aktivitas masyarakat.

Dari sisi kelompok pengunjuk rasa, mahasiswa menunjukkan peningkatan aktivitas yang konsisten, khususnya pada tahun 2022. Kelompok buruh juga berkontribusi besar pada jumlah aksi, terutama pada tahun 2020 dengan angka tertinggi mencapai 100 aksi. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan isu ketenagakerjaan dan perubahan regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Sebaliknya, aksi yang melibatkan warga desa dan masyarakat umum cenderung fluktuatif, dengan lonjakan signifikan dari masyarakat umum pada tahun 2023 (115 aksi). Sementara itu, kelompok PNS tetap menjadi kontributor yang minim dalam unjuk rasa, hanya menunjukkan sedikit keterlibatan pada tahun 2021 dan 2022.

Adapun aksi dari kelompok parpol/ormas menunjukkan penurunan tajam setelah mencapai puncak pada tahun 2020 (133 aksi). Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan strategi politik atau penurunan intensitas isu-isu yang memobilisasi mereka. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan dinamika sosial-politik yang dipengaruhi oleh kondisi nasional dan global, yang memengaruhi berbagai kelompok masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya di ruang publik.

Dalam hal tuntutan yang diajukan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Table 7 Frekuensi Unjuk Rasa di Jawa Tengah Menurut Tuntutan

No	Kelompok Massa	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Politik	9	15	32	25	0
2	Ekonomi	87	52	90	94	5
3	Sosbud	234	109	98	152	148
4	Pendidikan	7	2	0	0	0
5	Kesehatan	7	8	2	0	0
6	Kamtibmas	13	13	29	62	3
	Jumlah	357	212	251	333	156

Sumber: Kesbangpol Jateng, 2025

Berdasarkan data tersebut, frekuensi unjuk rasa di Jawa Tengah menurut tuntutan selama periode 2020-2024, terlihat bahwa tuntutan yang didominasi oleh isu sosial-budaya (Sosbud) tetap menjadi penyumbang terbesar jumlah aksi unjuk rasa di hampir semua tahun, terutama pada tahun 2020 dengan angka tertinggi mencapai 234 aksi. Dominasi isu Sosbud ini menunjukkan adanya keresahan masyarakat terhadap isu-isu sosial, budaya, atau mungkin terkait kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka.

Sementara tuntutan ekonomi menunjukkan peningkatan tajam pada tahun 2023 dengan 94 aksi. Lonjakan ini bisa jadi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pasca-pandemi, termasuk inflasi, pengangguran, atau dampak kebijakan ekonomi tertentu.

Tuntutan politik juga menunjukkan peningkatan mencolok, terutama pada tahun 2022 dengan 32 aksi. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran atau keterlibatan masyarakat dalam isu-isu politik, mungkin terkait dengan proses pemilu atau kebijakan pemerintahan yang kontroversial. Sebaliknya, isu-isu seperti pendidikan dan kesehatan cenderung memiliki frekuensi aksi yang rendah dan cenderung stagnan, dengan angka nyaris nol pada tahun 2022, yang mungkin mencerminkan prioritas yang lebih rendah dibandingkan isu ekonomi dan politik.

Table 8 Frekuensi Orang Asing Pendatang di Provinsi Jawa Tengah

No	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Corp Diplomatik	8	9	6	11	5
2	Tamu	1536	1536	14229	2268	12034
3	Riset	0	0	0	0	0
4	Artis/ Shooting Film	23	23	5	4	0
5	Wartawan	0	0	0	0	0
6	Tenaga Kerja	2432	2432	3404	6919	6
7	Atlet Asing	0	0	0	0	0
	Jumlah Orang	**2432**	**2432**	**17644**	**9202**	**12045**

Sumber: Kanwil Kemenkumham Jateng, 2025

Berdasarkan data pada Tabel diatas, frekuensi kedatangan orang asing di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Salah satu kategori yang mendominasi adalah tenaga kerja asing, yang konsisten mencatat angka tinggi, mencapai puncaknya sebanyak 6.919 orang pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan peran Jawa Tengah sebagai salah satu tujuan utama tenaga kerja asing, yang tentunya membutuhkan pengawasan intensif oleh Kesbangpol untuk memastikan keberadaan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kesbangpol juga memiliki peran strategis dalam memantau aktivitas kategori lain, seperti tamu asing dan artis yang melakukan kegiatan shooting film. Kehadiran tamu asing yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2020 dan 2021, menunjukkan perlunya koordinasi yang kuat antara Kesbangpol, imigrasi, dan instansi lain untuk menjamin bahwa aktivitas mereka tidak melanggar regulasi dan tetap memberikan kontribusi positif bagi wilayah setempat.

Selain itu, kategori diplomat, peneliti, dan wartawan, meskipun jumlahnya lebih kecil, tetap menjadi perhatian penting. Stabilitas angka dalam kategori ini mencerminkan adanya pengawasan administratif yang efektif. Kesbangpol berperan memastikan bahwa keberadaan mereka tidak hanya terdaftar secara resmi tetapi juga selaras dengan tujuan menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah Jawa Tengah. Fluktuasi data ini menjadi cerminan bahwa keberadaan orang asing perlu terus diawasi secara ketat oleh Kesbangpol untuk menjaga kepentingan masyarakat dan keamanan daerah.

Indeks Ketahanan Nasional (IKN) adalah alat pengukuran yang dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk menilai tingkat ketangguhan suatu wilayah atau negara dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Indeks ini dirancang berdasarkan *Asta Gatra*, yaitu delapan aspek strategis. Kondisi Ketahanan Nasional di Provinsi Jawa Tengah dari berbagai gatra pembangunan dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Nasional untuk mengukur ketahanan daerah, yang didalamnya terdapat 8 gatra, 37 aspek, 108 variabel dan indikator dari berbagai aspek pembangunan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 9 Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Gatra	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Geografi	3,73	Cukup Tangguh	3,33	Cukup Tangguh	3,43	Cukup Tangguh	3,43	Cukup Tangguh	3,20	Cukup Tangguh
2	Demografi	3,28	Cukup Tangguh	3,28	Cukup Tangguh	3,29	Cukup Tangguh	3,22	Cukup Tangguh	3,14	Cukup Tangguh
3	Sumber Kekayaan Alam	2,76	Cukup Tangguh	2,76	Cukup Tangguh	2,76	Cukup Tangguh	2,74	Cukup Tangguh	2,62	Cukup Tangguh
4	Ideologi	2,98	Cukup Tangguh	2,98	Cukup Tangguh	2,98	Cukup Tangguh	2,96	Cukup Tangguh	2,96	Cukup Tangguh
5	Politik	3,14	Cukup Tangguh	3,14	Cukup Tangguh	3,15	Cukup Tangguh	3,08	Cukup Tangguh	3,11	Cukup Tangguh
6	Ekonomi	2,99	Cukup Tangguh	2,99	Cukup Tangguh	2,99	Cukup Tangguh	2,99	Cukup Tangguh	2,88	Cukup Tangguh
7	Sosbud	2,95	Cukup Tangguh	2,95	Cukup Tangguh	2,95	Cukup Tangguh	2,98	Cukup Tangguh	3,10	Cukup Tangguh
8	Pertahanan dan Keamanan	3,02	Cukup Tangguh	3,02	Cukup Tangguh	3,02	Cukup Tangguh	3,02	Cukup Tangguh	2,82	Cukup Tangguh
	Skor IKN	3,02	Cukup Tangguh	3,04	Cukup Tangguh	3,05	Cukup Tangguh	3,03	Cukup Tangguh	2,97	Cukup Tangguh

Sumber: Labkurtannas, 2025

Berdasarkan Tabel 10, Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi skor pada masing-masing gatra dari tahun 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, skor IKN Jawa Tengah cenderung stabil dengan status "Cukup Tangguh," mencerminkan ketahanan wilayah yang cukup baik meskipun terdapat tantangan di beberapa aspek. Skor rata-rata IKN tertinggi dicapai pada tahun 2022 dengan nilai 3,05. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan lancar dan aman sehingga stabilitas politik di Jawa Tengah dengan ditandai dengan nilai indeks ketahanan ekonomi di tahun 2024 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023.

Gatra yang berkontribusi besar terhadap stabilitas IKN adalah Sosbud, Politik, Demografi, dan Geografi, yang konsisten memperoleh skor tinggi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan lokal dalam menjaga stabilitas sosial dan pemerintahan. Sebaliknya, gatra Ideologi dan Sumber Kekayaan Alam memiliki skor yang relatif lebih rendah. Ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus pada tantangan pengolaan sumber daya alam dan penguatan ideologi di masyarakat.

Kesbangpol memegang peran penting dalam menjaga dan meningkatkan skor IKN, terutama dengan memperkuat sinergi antara berbagai gatra. Pengawasan dan pembinaan terhadap elemen-elemen masyarakat, termasuk organisasi massa dan aktivitas asing, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan nasional di Jawa Tengah. Dengan fokus pada penguatan aspek yang masih lemah, diharapkan status ketangguhan dapat meningkat pada masa mendatang.

B) Politik dan Demokrasi

Situasi politik di Provinsi Jawa Tengah tercermin dalam pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilukada yang berlangsung secara demokratis dan tertib, tanpa adanya pengerahan massa yang berujung pada tindakan anarkis. Tingkat partisipasi pemilih dalam berbagai pemilu menunjukkan pola serupa dengan tren nasional, yaitu mengalami penurunan secara konsisten.

Table 10 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum 2019 - 2024

No	Pemilihan Umum	Tahun (Persentase Rata-Rata)		
		2019	2020	2024
1	Pilkada Kabupaten/ Kota	-	74,34	74,51
2	Pilgub dan Wagub	-	-	73,04
3	Pileg DPR dan DPD	80,21	-	82,80
4	DPRD Provinsi Jawa Tengah			82,68
5	Pilpres dan Wapres	80,21	-	82,98

Sumber: KPU Jateng, 2024

Pada Pemilu 2019, partisipasi masyarakat tercatat cukup tinggi untuk pemilihan legislatif DPR dan DPD serta Pilpres dan Wapres, masing-masing sebesar 80,21%. Angka ini menjadi dasar penting bahwa mayoritas masyarakat masih memiliki antusiasme untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang berdampak luas terhadap arah kebijakan nasional.

Memasuki tahun 2020, khususnya pada Pilkada Kabupaten/Kota, partisipasi pemilih mencapai 74,34%. Angka ini relatif baik untuk tingkat lokal, meskipun lebih rendah dibandingkan partisipasi dalam pemilu legislatif dan presiden. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor kedekatan politik lokal, tingkat sosialisasi, serta dinamika kontestasi di daerah.

Pada Pemilu 2024, partisipasi masyarakat terlihat stabil dan bahkan naik di beberapa jenis pemilihan. Untuk Pilkada Kabupaten/Kota, angka partisipasi mencapai 74,51%, sedikit meningkat dibandingkan pilkada tahun 2020. Sementara itu, dalam Pilgub dan Wagub, tercatat partisipasi sebesar 73,04%, yang menunjukkan kesadaran warga cukup baik meski masih sedikit di bawah Pilkada Kabupaten/Kota.

Pemilu legislatif pada 2024 memperlihatkan tren peningkatan partisipasi yang sangat positif. Pileg DPR dan DPD mencatat 82,80%, sementara DPRD Provinsi Jawa Tengah mencapai 82,68%. Hal ini

menunjukkan bahwa kontestasi di tingkat legislatif lebih mampu menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat.

Puncaknya, partisipasi masyarakat dalam Pilpres dan Wapres 2024 naik menjadi 82,98%. Angka ini mempertegas bahwa pemilihan presiden selalu menjadi magnet utama dalam demokrasi Indonesia, dengan tingkat keterlibatan publik yang lebih tinggi dibandingkan pemilihan lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu cenderung konsisten di atas 70%, dengan peningkatan cukup signifikan pada pemilu 2024, terutama pada level nasional. Hal ini bisa dimaknai sebagai indikasi positif terhadap kualitas dan daya tarik demokrasi, meskipun masih ada ruang peningkatan, khususnya dalam pilkada dan pemilihan gubernur. Capaian partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 juga erat kaitannya dengan kualitas demokrasi yang berkembang di setiap daerah. Salah satu indikator utama yang mencerminkan kualitas demokrasi tersebut adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Di Provinsi Jawa Tengah, data IDI selama periode 2021 hingga 2023 memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika demokrasi di wilayah ini, sekaligus menunjukkan kekuatan dan tantangan yang perlu diperhatikan untuk mendorong partisipasi politik yang lebih baik di masa mendatang, sebagaimana yang tertera pada tabel sebagai berikut:

Table 11 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2021 - 2023

No	INDIKATOR IDI (METODE BARU)	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	97.09	93.54	95.74
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar Masyarakat	100	96.41	89.36
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	93.93	96.41	90.54
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	91.67	94.44	94.44
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	94.18	94.18	94.18
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	51.43	58.63	54.13
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	79.12	80.99	74.48
8	Kesetaraan Gender	94.47	97.29	97.82
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	46.67	86.67	58.33
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	71.83	74.67	77.83
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	83.88	77.48	78.38

No	INDIKATOR IDI (METODE BARU)	TAHUN		
		2021	2022	2023
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	94.05	94.43	94.87
13	Akses masyarakat terhadap informasi public	75.78	79.27	80.16
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	77.45	77.66	77.79
15	Kinerja Lembaga Legislatif	44.44	52	58.33
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	87.67	86.29	86.51
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	87.5	87.5	87.5
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	75	73.61	68.06
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup Masyarakat	66.27	66.85	68.59
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100	100	100
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan public	89.6	90.8	82.2
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	62.22	100	46.67
	SKOR IDI	**81,15**	**84,79**	**80,87**

Sumber: BPS, 2024

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang menarik. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat demokrasi mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, skor IDI mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 dengan 84,79, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 80,87. Tren ini mencerminkan adanya faktor-faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi di Jawa Tengah, baik dari sisi kebebasan individu maupun peran institusi. Jika dibandingkan dengan skor nasional, IDI Jawa Tengah secara konsisten berada di atas rata-rata nasional, yang mencatat skor 78,12 pada 2021, 80,41 pada 2022, dan 79,51 pada 2023.

Salah satu indikator penting yang menunjukkan dinamika ini adalah terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara. Pada tahun 2021, indikator ini mencatat nilai 97,09, namun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 93,54 sebelum akhirnya naik kembali menjadi 95,74 pada tahun 2023. Fluktuasi ini menunjukkan adanya upaya pemulihan jaminan kebebasan tersebut, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaannya. Kebebasan

berkeyakinan juga menunjukkan tren serupa dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 96,41, tetapi turun pada tahun 2023 menjadi 90,54.

Pada tingkat nasional, skor IDI yang mencapai 79,51 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tantangan dalam menjamin kebebasan ini juga dirasakan secara lebih luas.

Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan merupakan indikator lain yang mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 2021, nilai indikator ini hanya 46,67, namun melonjak drastis pada 2022 menjadi 86,67, sebelum kembali menurun pada 2023 menjadi 58,33. Lonjakan ini dapat mencerminkan adanya momentum tertentu, seperti pemilu atau kebijakan partisipatif yang berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat. Namun, penurunan di tahun berikutnya mengindikasikan bahwa keberlanjutan partisipasi masyarakat perlu diperhatikan melalui penguatan mekanisme yang inklusif. Dibandingkan dengan skor nasional, tren ini menunjukkan bahwa meskipun ada lonjakan di tingkat lokal, partisipasi masyarakat secara nasional masih menghadapi tantangan yang serupa.

Indikator kesetaraan gender mencatat perkembangan positif yang konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, indikator ini mencapai nilai 94,47 dan terus meningkat hingga mencapai 97,82 pada tahun 2023. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengakuan dan penerapan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan di Jawa Tengah. Hal ini dapat menjadi contoh keberhasilan dalam pengelolaan demokrasi yang mengutamakan inklusivitas dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Ketika dilihat dalam konteks nasional, skor IDI yang lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah mengindikasikan bahwa praktik kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan di berbagai daerah lain di Indonesia.

Di sisi lain, kinerja lembaga legislatif dan birokrasi dalam pelayanan publik menunjukkan tantangan yang perlu segera diatasi. Meskipun nilai kinerja lembaga legislatif mengalami peningkatan dari 44,44 pada tahun 2021 menjadi 58,33 pada tahun 2023, nilai tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan indikator lainnya. Demikian pula, kinerja birokrasi dalam pelayanan publik mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 82,2 dari nilai tertinggi 90,8 di tahun sebelumnya. Penurunan ini menggarisbawahi perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Ketika membandingkan dengan skor IDI nasional, performa institusi lokal Jawa

Tengah yang lebih baik dapat menjadi model praktik terbaik bagi daerah lain.

Secara keseluruhan, data IDI Provinsi Jawa Tengah mencerminkan capaian dan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat regional. Fluktuasi nilai IDI menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan di beberapa aspek, tantangan struktural masih perlu diatasi, terutama dalam menjamin keberlanjutan kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat, dan kinerja lembaga negara. Dibandingkan dengan skor IDI nasional, yang mencapai 79,51 pada 2023, Jawa Tengah masih menunjukkan keunggulan dalam beberapa aspek, tetapi perlu mempertahankan konsistensi untuk terus menjadi contoh bagi daerah lain. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Jawa Tengah.

C) Pembinaan LSM, Ormas, dan OKP

Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2013-2022 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP.

Gambaran Pemberdayaan Ormas

1

Secara Umum

Direktorat Ormas Kemendagri melaksanakan pembinaan, sosialisasi serta memberikan pengarahan tentang menjaga kondusifitas dan stabilitas daerah, menjaga toleransi kerukunan umat beragama, serta meminimalisir terjadinya konflik sekecil apapun langsung kepada organisasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui peranan penting Direktorat Ormas Kemendagri.

2

Pembinaan Ormas

Pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan dilakukan secara berkala melalui silahturahim ke lokus organisasi dan pembinaan umum bagi Ormas di Indonesia.

3

Pelaporan Ormas

Himbauan kepada Ormas untuk melakukan pelaporan kepada Bakesbangpol, untuk dikatakan dalam registrasi pemerintah daerah.

4

Bantuan Ormas

Diberikan kepada Ormas yang tercatat di peerintah daerah dan telah melakukan proses SIPD

Ruang Lingkup dalam Pemberdayaan Organisasi Masyarakat meliputi :

1 Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pengutaan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi, pengembangan kemitraan, dukungan keahlian, program, dan pendampingan, penguatan kepemimpinan dan kaderisasi, pemberian penghargaan, dan/atau Penelitian dan pengembangan

2 Fasilitasi Kebijakan

Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

3 Peningkatan Kualitas SDM

Pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan/atau kursus.

Table 12 Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025

No	Keterangan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sarasehan antar etnis serta akulturasi budaya	2	10	2	-	-	-
2	Sarasehan pendayahgunaan Ormas	1	4	60	86	22	80
3	Sarasehan pengkajian pemeliharaan dan pengembangan kesenian serta budaya daerah	-	-	3	-	-	-
4	Peningkatan peran politik Ormas/ LSM/Toga/Toma	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**3**	**14**	**65**	**86**	**22**	**80**

Tabel diatas menunjukkan berbagai kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020–2025. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kegiatan sarasehan pendayagunaan Ormas mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023, mencapai

angka tertinggi yaitu 86 kegiatan. Hal ini mencerminkan adanya upaya intensif dari pemerintah daerah melalui Kesbangpol dalam memberdayakan Ormas agar lebih berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Kegiatan sarasehan antar etnis serta akulturasi budaya juga menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Meskipun jumlahnya sempat fluktuatif, ada lonjakan besar pada tahun 2021 dengan total 10 kegiatan, menunjukkan perhatian yang lebih terhadap harmoni antar etnis. Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat Jawa Tengah.

Selain itu, kegiatan pengkajian pemeliharaan dan pengembangan kesenian serta budaya daerah sempat vakum pada tahun 2020 dan 2021, sebelum kembali dilaksanakan pada tahun 2022. Sementara itu, kegiatan peningkatan peran politik Ormas/LSM/Toga tidak dilaksanakan setelah tahun 2017, menunjukkan adanya perubahan fokus pembinaan. Kesbangpol diharapkan dapat terus meningkatkan variasi dan frekuensi kegiatan pembinaan, terutama yang mendukung integrasi sosial, pemberdayaan budaya, dan peran politik masyarakat.

Untuk mendukung terciptanya kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk, upaya pembinaan yang dilakukan oleh Kesbangpol juga berperan penting dalam memperkuat harmoni antarumat beragama. Kerukunan Umat Beragama adalah suatu kondisi harmonis dalam hubungan antarumat beragama yang didasarkan pada prinsip-prinsip toleransi, saling pengertian, saling menghormati, serta penghargaan terhadap kesetaraan dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Selain itu, kerukunan ini diwujudkan melalui kerja sama yang erat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman kehidupan berbangsa.

Permasalahan toleransi di Jawa Tengah masih menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian. Dalam kurun waktu 2021-2024 tercatat puluhan konflik keagamaan, sebagian besar berupa konflik intraagama akibat perbedaan aliran dalam satu agama, dan sebagian lainnya antaragama. Situasi ini menunjukkan masih adanya potensi gesekan horizontal di masyarakat.

Pendirian rumah ibadah juga kerap menjadi sumber permasalahan. Persyaratan administratif yang tidak terpenuhi, seperti izin mendirikan bangunan dan persetujuan warga sekitar, sering memicu penolakan dan menimbulkan kesan diskriminasi. Selain itu, kelompok minoritas seperti penganut Baha'i di Kabupaten Pati masih menghadapi hambatan dalam pengakuan administratif, termasuk pencatatan sipil, pengakuan pernikahan, hingga akses pendidikan agama dan pemanfaatan fasilitas umum.

Kasus intoleransi juga masih ditemukan, di antaranya pembubaran kegiatan ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan, maupun tekanan sosial terhadap kelompok tertentu. Setara Institute mencatat ratusan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Tengah dalam kurun waktu satu dekade terakhir, yang memperlihatkan bahwa praktik intoleransi belum sepenuhnya hilang.

Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai keberagaman. Sebagian warga mudah terprovokasi isu SARA dan tidak jarang menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. Di sisi lain, lembaga mediasi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sudah berperan aktif, namun kapasitas dan jangkauannya masih terbatas sehingga tidak semua konflik dapat diselesaikan secara cepat.

Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan toleransi di Jawa Tengah berakar pada gesekan sosial-keagamaan, hambatan administratif, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta rendahnya literasi keberagaman. Hal tersebut memerlukan strategi yang komprehensif agar nilai-nilai toleransi dapat semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Kerukunan ini tidak hanya menjadi cerminan dari persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh untuk menjaga stabilitas sosial dan perdamaian dalam keberagaman Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan meningkatkan tingkat kerukunan umat beragama agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni dan kerukunan antarumat beragama di wilayah Jawa Tengah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana

masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama meskipun memiliki keyakinan agama yang berbeda. IKUB biasanya dihitung berdasarkan beberapa dimensi utama, seperti:

1. **Toleransi**: Sikap terbuka terhadap perbedaan keyakinan dan praktik agama lain.
2. **Kesetaraan**: Pengakuan terhadap hak-hak yang setara bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang agama.
3. **Kerja Sama**: Partisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok agama.

Sebagai salah satu wujud nyata, tingkat kerukunan umat beragama di Jawa Tengah selama periode tahun 2021 hingga 2024 telah diukur dan hasilnya dapat dilihat melalui data yang disajikan dalam tabel berikut. Tabel ini memberikan gambaran mengenai kondisi kerukunan yang ada dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk langkah-langkah strategis di masa mendatang.

Table 13 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Jawa Tengah selama empat tahun terakhir

No	Indeks	Tahun							
		2021		2022		2023		2024	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Toleransi	67,3	Rukun	73,68	Rukun	74,48	Rukun	76,76	Rukun
2	Kesetaraan	72,2	Rukun	75,06	Rukun	80,09	Rukun	80,04	Rukun
3	Kerjasama	71,4	Rukun	74,12	Rukun	79,13	Rukun	80,15	Rukun
4	SKOR IKUB JATENG	75,12	Rukun	74,28	Rukun	76,02	Rukun	78,98	Rukun

Sumber: Kanwil Kemenag Jateng, 2024

Tabel tersebut memberikan gambaran rinci mengenai perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir. Data ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni antarumat beragama. Seluruh dimensi berhasil mempertahankan status kondisi "Rukun," meskipun terdapat variasi skor dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam tingkat kerukunan, sekaligus mencerminkan hasil upaya bersama pemerintah dan masyarakat.

Pada tahun 2021 dengan skor 76,02. Skor ini mencerminkan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak setara bagi setiap individu, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang agama. Namun, pada tahun

2022, terdapat sedikit penurunan skor menjadi 75,05, meskipun status kondisi tetap berada di kategori "Rukun." Penurunan ini menjadi catatan penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan implementasi prinsip kesetaraan di masyarakat.

Dimensi kerja sama menampilkan kinerja yang stabil dan positif sepanjang periode pengukuran. Dengan skor tertinggi sebesar 75,7 pada tahun 2021, dimensi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan lintas agama tetap menjadi pilar penting dalam menjaga kerukunan. Penurunan skor menjadi 74,12 pada tahun 2022 menunjukkan adanya tantangan tertentu yang mungkin memengaruhi interaksi sosial lintas agama, meskipun status kondisi tetap "Rukun." Pada tahun 2023, skor kembali meningkat menjadi 76,02, menandakan adanya perbaikan dalam kerja sama antarkelompok agama.

Skor keseluruhan IKUB Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2022, skor berada di angka 74,28, yang mencerminkan tingkat kerukunan yang sudah cukup baik. Peningkatan skor pada tahun 2023, yang mencapai 76,02, merupakan pencapaian signifikan yang menunjukkan hasil kerja keras semua pihak dalam menjaga harmoni sosial.

Nilai indeks kerukunan umat beragama di Jawa Tengah memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat tantangan yang dihadapi, kondisi kerukunan umat beragama di Jawa Tengah tetap berada dalam kategori yang sangat baik. Peningkatan skor pada setiap dimensi menjadi indikasi bahwa langkah-langkah strategis, seperti dialog lintas agama, penguatan pendidikan toleransi, dan kerja sama sosial, telah memberikan dampak positif. Hal ini mencerminkan bahwa upaya menjaga harmoni beragama membutuhkan pendekatan berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika sosial yang ada.

Dengan keberhasilan yang tercermin dalam tabel diatas, diharapkan pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan masyarakat dapat terus bekerja sama untuk mempertahankan dan meningkatkan kerukunan di masa depan. Program-program baru yang fokus pada penguatan toleransi, penghapusan diskriminasi, dan peningkatan kerja sama antarkelompok agama perlu terus dilaksanakan. Dengan demikian, Jawa Tengah dapat menjadi contoh nyata bagaimana kerukunan umat beragama dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Realisasi program, kegiatan, dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun periode Renstra OPD Tahun 2018-2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

   Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan diselenggarakan untuk terpeliharanya pemantapan nilai-nilai Pancasila guna mengembalikan ruh karakter bangsa Indonesia mdi tengah gempuran arus globalisasi dan era modern saat ini. Kuatnya karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menyebabkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham dari luar yang dapat mengganggu keutuhan NKRI seperti paham radikalisme dan terorisme. Keberhasilan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dihasilkan dari sinergitas yang terjalin antar stakeholder dengan melibatkan pentahelix yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan media dalam pelaksanaan pembumian dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sampai ke akar rumput dengan pemanfaatan ruang-ruang publik dan ruang digital. Selain itu Badan Kesbangpol terus melakukan komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak yang berkepentingan melalui pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

   Hasil yang dicapai adalah:

   a. Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk sebanyak 600 orang
   b. Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan diikuti oleh 1450 orang
   c. Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk 3600 orang
   d. Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila 5.540 orang
   e. Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa 1.260 orang
   f. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme 100 orang

g. Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan generasi muda lintas etnis 260 orang
h. Pelaksanaan Apel Kebangsaan
i. Deklarasi gerakan perwujudan Jawa Tengah sebagai Benteng Pancasila.

2. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Manfaat penyelenggaraan program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah terciptanya kondusifitas Jawa Tengah yang aman serta dapat menjamin stabilitas perekonomian dan pembangunan dengan melakukan sinergitas antar stakeholder dan masyarakat dalam menangani konflik sosial serta pengoptimalan data di lapangan dengan melalui penggunaan aplikasi Sistem Kewaspadaan dan Kerawanan Dini (SiWARDI) sehingga dapat diketahui kejadian secara up to date dan dilakukan pemetaan. Hasil yang dicapai adalah:

a. Tertanganinya 72 kasus kerawanan sosial politik.
b. Tersedianya data/informasi daerah untuk antisipasi potensi kerawanan konflik di 35 kabupaten/kota.
c. Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial 5995 orang
d. Jumlah Kader Resolusi Konflik yang terbentuk 1.525 orang
e. Jumlah pantauan orang asing
f. Terlaksananya koordinasi pengamanan wilayah dengan kabupaten/kota dan aparat keamanan.

3. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Manfaat penyelenggaraan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yaitu semakin meningkatnya peran dan fungsi Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba, demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel guna menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keterlibatan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dalam pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui edukasi dan sosialisasi yang berjalan efektif. Masyarakat semakin

mengerti pentingnya hidup bersama dengan saling toleransi antar maupun inter agama, suku, etnis, membangun kebersamaan, solidaritas dan sense of crisis, serta bekerja bergotong royong.

Strategi yang dilakukan dengan melakukan edukasi dan pemahaman kepada ormas mengenai kemandirian dan pemberdayaan ormas; Melakukan sinergitas, sharing informasi dan serta merumuskan solusi bersama aparat keamanan dan instansi terkait terhadap dampak yang muncul akibat adanya pergerakan ormas radikal dan berlakunya Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Ormas, yang dijadikan sebagai pedoman ormas dalam melakukan aktivitas di Jawa Tengah;

4. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

   Manfaat penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini disebabkan karena adanya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dikemas dalam bentuk edukasi dan sosialisasi dengan melibatkan pelaku usaha, pelaku budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, penggiat anti narkotika dan seluruh elemen masyarakat telah berjalan efektif guna mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

   Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) telah memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat, penggiat anti narkotika dan dunia pendidikan sehingga diharapkan Jawa Tengah menjadi Provinsi Bersinar (Bersih dari Narkotika). Selain itu, mengupayakan toleransi kerukunan umat beragama dan penganut kepercayaan dalam bingkai moderasi beragama yang dikembangkan guna menjaga kondusifitas Jawa Tengah.

5. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

Manfaat penyelenggaraan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; menumbuhkembangkan keteladanan praktek-praktek politik yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan etika politik agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945; meningkatkan pemahaman etika dan budaya politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan sesuai dengan ideologi negara serta menciptakan kesamaan pandang masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan etika politik agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan etika dan norma budaya bangsa; meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik atau peran berpolitik untuk kesuksesan demokrasi di Negara Indonesia melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kab/kota dan menjadikan media, institusi pendidikan dan keagamaan sebagai mitra pilar demokrasi yang diharapkan dapat turut menanamkan kesadaran publik tentang perlunya bersikap etis dan kritis dalam berdemokrasi. Selain itu melaksanakan diskusi dengan elemen masyarakat mengenai isu aktual, memperkuat Literasi media dan literasi politik yang dimiliki masyarakat dan mendorong peran serta elemen masyarakat untuk berperan aktif menjadi agen penghubung dan agen perubahan yang diharapkan dapat meneruskan ke masyarakat luas.

Table 14 Penyampaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tegah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A.	Renstra PD Tahun 2018 -2023																			
1	Tujuan Perangkat Daerah																			
	Persentase masyarakat yang pahamterhadap kesatuan bangsa dan politik	%				81	83				88.32	90,28				109.04	108,77			
	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai						3,04	3,25				3,89	3,65				127,96	112,31	
2	Sasaran Perangkat Daerah																			
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%				81	83				88.61	90,45				109.40	108,98			
	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	%				81	83				88.02	90,12				108.67	108,58			
	Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai						2,97	3,15					3,75	3,45			126,26	109,52	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indeks ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai						3,12	3,35					4,10	3,85			131,41	114,93	
3	Program																			
1	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang					81	83				90.98	91,14				112.32	109,81			
2	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini										**89.29**	**9**				**23**	**7**			
	Persentase Penanganan kejadian konflik sosial		-		-		**0**				**0**	**0**				**0**	**0**			
3	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa										**7**	**1**				**64**	**4**			
4	Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI		-		-						**2**	**2**				**67**	**8**			-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
5	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik							**4**	**0**				**0**	**9**				**133,76**	**14,41**	
6	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		-	-	-			**0**	**0**				**0**	**5**				**177,78**	**118,97**	
7	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik							**2**	**1**				**0**	**0**				**109,59**	**12,54**	
8	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		-	-	-			**3,23**	**0**				**5**	**0**				**62**	**4**	
9	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		-	-	-			**0**	**0**				**0**	**2**				**03**	**5**	
B.	Renstra PD Tahun 2024 - 2026																			

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Tujuan Perangkat Daerah																			
	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	**Nilai**								**2,75**					**3,03**					**110.20**
2	Sasaran Perangkat Daerah																			
	Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	**Nilai**								**2,89**					**2,97**					**102,77**
	Indeks ketahanan politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	**Nilai**								**2,60**					**3,04**					**118,46**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3	Program																			
1	Indeks Ideologi Pancasila									3,0					3,60					120
2	Indeks kewaspadaan Nasional														0					
3	Indeks Kinerja Ormas									4										
4	Indeks penguatan dampak ekonomi		-	-	-										-					7
5	Indeks Toleransi									0					6					
6	DI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi		-	-	-															

Table 15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Prov. Jateng Tahun 2020-2024

Uraian	APBD pada tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp.000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja	17.035.293	83.939.364	115.857.796	611.106.972	860.224.920.	16.374.081	82.092.395	115.202.682	609.673.519.	858.737.253.	96,12 %	97,80 %	99,43	99,77 %	99,83 %	16.863.792.540 %	16.847.263.440 %
Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Jateng, 2018

Dilihat dari tabel diatas dapat disampaikan :

1. Setiap tahunnya rasio antara realisasi anggaran dan pagu anggaran yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi semakin meningkat dengan rasio tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 99,77sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 96,12%.

2. Rasio antara realisasi dan anggaran rendah dikarenakan adanya realisasi pembayaran gaji dan tunjangan dibayarkan sesuai dengan jumlah pegawai padahal setiap tahunnya terdapat pegawai yang pensiun, selain itu disebabkan adanya efisiensi pada anggaran perjalanan dinas, pembayaran alat tulis kantor dan cetak.

2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari perkembangan dinamika sosial politik yang terjadi di Indonesia secara umum dan khususnya di Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam lima tahun mendatang. Permasalahan ini terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi lembaga tersebut dalam menjalankan program-program pembangunan yang berfokus pada kesatuan bangsa, ketahanan negara, serta penguatan demokrasi. Permasalahan yang dimaksud dapat dibagi dalam beberapa bidang sebagai berikut:

a. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;

Kondusivitas wilayah menjadi salah satu tantangan yang harus dijaga dalam mendukung perwujudan daya saing daerah. Menjaga kondusivitas wilayah memiliki tantangan yang rumit karena berbagai persoalan baik ekonomi, sosial maupun budaya dapat dan/atau memiliki masalahnya sendiri-sendiri dan dapat juga menjadi simpul permasalahan yang kompleks

Konflik sosial berbasis SARA masih sering terjadi akibat minimnya pemahaman terhadap regulasi keberagaman, seperti fanatisme yang berkembang tanpa kontrol. Maraknya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial turut memperburuk situasi, melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara, serta menghambat upaya menjaga stabilitas nasional.

Disisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan berdampak pada meningkatnya intoleransi dan konflik sosial di berbagai wilayah. Penyebaran paham radikalisme serta ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila semakin berkembang, terutama di kelompok rentan. Partisipasi politik masyarakat juga menurun, menyebabkan semakin lemahnya kesadaran kolektif dalam menjaga keutuhan bangsa.

b. Bidang Ketahanan Bangsa;

Isu ini berangkat dari kondisi dan akar permasalahan dimana adanya sengketa internal ormas akibat dualisme kepemimpinan yang menimbulkan perpecahan dan konflik horizontal, ormas sebagai sarana infiltrasi paham radikalisme dan terorisme serta adanya potensi pengaruh ideologi ormas asing dan ormas yang terafiliasi dengan

ormas asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Pergeseran karakter dan budaya akibat pengaruh budaya dari luar juga memberikan pengaruh pada perubahan kondisi lingkungan masyarakat salah satunya adalah potensi terjadinya intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme yang mengarah pada aksi terorisme.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius bagi ketahanan bangsa, terutama di kalangan generasi muda. Lingkungan sosial yang permisif terhadap narkoba menjadi faktor utama yang menyebabkan penyebarannya semakin luas. Minimnya edukasi dan pencegahan di tingkat keluarga serta sekolah membuat generasi muda rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Tanpa adanya upaya yang lebih serius dari pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, penyalahgunaan narkoba akan terus merusak kehidupan sosial dan mengancam masa depan bangsa.

c. Bidang Politik Dalam Negeri;

Partisipasi politik masyarakat yang rendah menjadi tantangan besar dalam memperkuat sistem demokrasi. Banyak warga yang masih belum memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam pemilu dan proses pengambilan kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik masih belum mampu menjalankan perannya secara maksimal dalam membangun demokrasi yang sehat. Hal ini berkaitan juga dengan kapasitas kelembagaan politik untuk dapat memperhatikan proses penyusunan kebijakan dan pendidikan politik, khususnya bagi kader partai politik.

Khusus pada stabilitas politik, permasalahan yang kompleks terjadi pada agenda-agenda khusus berkaitan dengan pelaksanaan pesta demorkasi di daerah. Persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah berkaitan dengan Pemenuhan HAM, seperti pemenuhan hak-hak pekerja, kebebasan berpendapat dan pers yang bebas dalam menjalankan tugas maupun fungsinya. Kesetaraan masyarakat dalam partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik, khususnya melalui lembaga perwakilan.

Meningkatnya ujaran kebencian dalam ruang politik serta kurangnya regenerasi kepemimpinan nasional semakin memperburuk situasi. Akibatnya, stabilitas politik terganggu, menciptakan

kesenjangan dalam kebijakan publik yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah mengkaji hasil capaian kinerja dan menganalisis gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada periode sebelumnya, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya, maka ditetapkan permasalahan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2025-2029, yaitu: "**Menurunnya ketahanan wilayah di Jawa Tengah**". Permasalahan utama ini kemudian dirincikan lebih lanjut beserta akar penyebabnya sebagai berikut:

Table 16 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Menurunnya ketahanan wilayah di Jawa Tengah	Menurunnya stabilitas politik	• Meningkatnya konflik sosial
		• Kurangnya Pemenuhan HAM, seperti pemenuhan hak-hak pekerja, kebebasan berpendapat dan pers yang bebas dalam menjalankan tugas maupun fungsinya
		• Menurunnya partispasi politik masyarakat
		• Meningkatnya ujaran kebencian dalam ruang politik
		• Belum optimalnya peran lembaga demokrasi
	Menurunnya ketahanan bangsa	• Menurunnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		• Penyalahgunaan dan peredaran narkoba
		• Pergeseran karakter dan budaya akibat pengaruh budaya dari luar
		• Menurunnya ketahanan ideologi dan dan wawasan kebangsaan
		• Menurunnya toleransi dan kesetaraan

2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan berbagai isu yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu tantangan yang bersumber dari kondisi internal dan tantangan yang berasal dari faktor eksternal.

2.5.1 Tantangan

Tantangan merupakan segala bentuk hambatan, rintangan, atau situasi yang memerlukan usaha, strategi, dan kemampuan tertentu untuk diatasi atau diselesaikan. Tantangan dapat berasal dari berbagai faktor, baik yang bersifat internal, seperti keterbatasan sumber daya atau kurangnya kompetensi, maupun eksternal, seperti perubahan lingkungan, persaingan, atau dinamika sosial dan politik. Dalam konteks organisasi, tantangan sering kali menjadi bagian dari proses menuju pencapaian tujuan dan dapat menjadi peluang untuk mendorong inovasi, pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan.

a. Kondisi Internal
    1) Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik
    2) Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
    3) Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

b. Kondisi Eksternal
    1) Tantangan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ditengah arus keterbukaan informasi, globalisasi dan teknologi yang berkembang pesat.
    2) Tantangan dalam menjaga kondusivitas daerah untuk menghadapi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.
    3) Tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, peningkatan peran partai politik untuk mengurangi apatisme masyarakat dalam politik.

4) Tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama, menghindari terjadinya konflik sosial dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan.
5) Tantangan mobilitas penduduk yang cukup timggi antar wilayh kabupaten/kota di Provinsi Kawa Tengah dan atar Provinsi yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.

2.5.2 Peluang

Peluang Berdasarkan tantangan diatas serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka peluang yang didapat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

1) Modernisasi perkembangan serta pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatan kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi, media sosial dan lainnya.
2) Tersedianya regulasi/peraturan baik di tingkat pusat dan daerah Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
3) Tersedianya lembaga/ mitra yang dapat dioptimalkan kerjasamanya dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forkopimda, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS).

2.5.3 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah maka Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan melaksanakan urusan

pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2) Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5) Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
6) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan;
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi: Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

2.5.4 Isu Strategis Lingkungan Dinamis

a. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra K/L

Merujuk pada kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJPD Tahun 2025-2045, periode pertama (2025-2029) diarahkan pada “Penguatan Landasan Transformasi”. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya, ekologi, keamanan daerah, demokrasi substansial, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan landasan transformasi ini juga didukung oleh implementasi pembangunan kewilayahan yang merata melalui pemenuhan sarana dan prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

Dalam konteks ini, transformasi sosial diarahkan pada peningkatan mutu layanan pendidikan yang berorientasi pada

keseimbangan demand-supply, penguatan kelembagaan, pemenuhan pelayanan kesehatan yang inklusif, serta penguatan perlindungan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi ekonomi difokuskan pada penerapan ekonomi hijau, penguatan produksi dan hilirisasi sektor unggulan di daerah, serta penguatan ekonomi kreatif. Hal ini didukung oleh peningkatan daya saing sumber daya manusia yang lebih produktif, inovatif, dan kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi.

Transformasi tata kelola diarahkan pada penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis dan pemerintahan yang kolaboratif. Hal ini dicapai melalui penguatan penerapan kerja sama antardaerah yang efektif dan efisien.

Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, serta stabilitas ekonomi makro diarahkan pada upaya penguatan ketentraman dan ketertiban umum, menciptakan wilayah yang kondusif, serta menjaga stabilitas harga guna melindungi daya beli masyarakat.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada penguatan karakter masyarakat Jawa Tengah melalui strategi pemajuan kebudayaan, perlindungan, dan pengembangan nilai-nilai agama dan budaya. Nilai-nilai tersebut diinternalisasikan melalui pendidikan karakter, baik dalam keluarga maupun dalam lingkup pendidikan formal dan nonformal. Selain itu, penguatan kohesi sosial dilakukan dengan menjadikan organisasi dan komunitas agama serta masyarakat sebagai mitra kolaboratif. Pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penyediaan sanitasi dan air bersih juga menjadi prioritas dalam mendukung ketahanan ekologi.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian tujuan pembangunan melalui penguatan ketahanan ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Indikator yang digunakan adalah Indeks Ketahanan Ipoleksosbud.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai

masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis. Dalam kaitannya dengan Kabupaten/Kota, RPJPD 2025-2045 periode pertama ini menjadi acuan yang harus diterjemahkan dalam RPJMD masing-masing Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tugas dan fungsi Kesbangpol di tingkat Kabupaten/Kota akan selaras dengan tugas dan fungsi Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI maka perlu memperhatikan sasaran strategis dari Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tercantum pada Renstra 2025 – 2029 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas politik dan demokrasi Indonesia serta implementasi nilai-nilai ideology Pancasila;
2. Meningkatkan kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengeloaan keuangan daerah;
3. Terwujudnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya
4. Meningkatkan kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan berbasis teknologi
5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.

b. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan perangkat daerah

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di seluruh wilayah negara. Di tingkat daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (RTRWP Jawa

Tengah) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam penataan ruang wilayah serta menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah.

Keberhasilan program pembangunan daerah sangat bergantung pada kestabilan politik dan ketahanan bangsa. Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa upaya pengembangan sektor ekonomi, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, industri, dan pariwisata tetap sejalan dengan tujuan kesatuan bangsa dan politik. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah telah mempertimbangkan hasil telaahan tata ruang wilayah guna memastikan relevansi programnya dengan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana diatur dalam kebijakan RTRWN dan RTRWP.Selain itu, merujuk pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan wilayah, kebijakan, rencana, maupun program. Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS guna memastikan pembangunan berkelanjutan tercermin dalam setiap kebijakan, rencana, dan/atau program yang dijalankan.

c. **Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bagi Pelayanan Perangkat Daerah**

Selain itu, merujuk pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan wilayah, kebijakan, rencana, maupun program. Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS guna

memastikan pembangunan berkelanjutan tercermin dalam setiap kebijakan, rencana, dan/atau program yang dijalankan.

Kebijakan, rencana, atau program yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf b UU PPLH, wajib menyertakan KLHS sebagai bagian dari proses perencanaan. Namun, berdasarkan hasil telaahan, penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tidak berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU PPLH terkait muatan KLHS. Dengan demikian, implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan selaras tanpa ada konflik atau implikasi yang signifikan di antara keduanya.

Program kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah meliputi pendidikan politik, penguatan wawasan kebangsaan, internalisasi nilai-nilai Pancasila, menjaga kondusivitas wilayah, serta peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Program-program tersebut telah diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam KLHS, sehingga mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

d. **Hasil Penjaringan Masukan Stakeholder oleh Perangkat Daerah**

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, telah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 14 April 2025 dengan mengundang OPD terkait, instansi vertikal, serta Kepala Kesbangpol dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Forum ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan guna menyusun arah kebijakan yang selaras antara pusat, provinsi, dan daerah. Beberapa pokok hasil penjaringan masukan dari forum tersebut antara lain:

- Penguatan Deteksi Dini dan Stabilitas Wilayah
  - Seluruh Kepala Kesbangpol kabupaten/kota diminta meningkatkan kewaspadaan dan kapasitas deteksi dini

terhadap potensi gangguan stabilitas sosial politik, terutama dalam masa transisi pemerintahan.
  - Deteksi dini dianggap sebagai prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemprov Jawa Tengah tahun 2025.
- Sinkronisasi Program Strategis
  - Ditekankan pentingnya sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program strategis nasional, khususnya: Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, Reformasi politik dan pencegahan narkoba, Peningkatan toleransi antarumat beragama, Penguatan ketahanan budaya lokal dan mitigasi ekstremisme.
  - Diharapkan adanya penyesuaian indikator kinerja (IKU) antara provinsi dan kabupaten/kota, khususnya terkait pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
- Pemberdayaan Kelembagaan Daerah
  - Beberapa kabupaten menyampaikan perlunya peningkatan tipe kelembagaan Kesbangpol (contoh: Kabupaten Jepara yang masih tipe C meskipun memiliki potensi dan nilai tinggi).
  - Perlunya dukungan peningkatan status kelembagaan Kesbangpol agar mampu menampung tugas-tugas strategis ke depan.
- Penguatan Peran FKUB, FPK dan FKPT
  - Diperlukan dukungan anggaran dan sinergi lintas lembaga untuk optimalisasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).
  - Kemenag mendorong adanya penguatan peran FKUB melalui dukungan regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.
- Digitalisasi dan Mitigasi Isu Strategis
  - Ditekankan perlunya memanfaatkan media sosial dan teknologi digital dalam mendeteksi dan menangani potensi kerawanan sosial dan penyebaran ujaran kebencian.
  - Ancaman radikalisme digital, termasuk fenomena viral seperti “goyang setbor”, diidentifikasi sebagai isu strategis yang perlu intervensi cepat.

- Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
  - DPRD menekankan bahwa nilai IDI menjadi indikator makro yang penting untuk mengukur stabilitas dan menarik investasi.
  - Diperlukan upaya kolektif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, termasuk melalui pembentukan jejaring kerja lintas sektor dan kolaborasi dengan lembaga legislatif.
- Moderasi Beragama dan Internasionalisasi
  - Program moderasi beragama dinilai perlu ditingkatkan, baik dalam bentuk pelatihan lokal maupun promosi ke luar negeri (seperti yang telah dilakukan Kota Salatiga).
  - Efisiensi anggaran menjadi tantangan yang harus diatasi melalui inovasi seperti pemanfaatan website bersama dengan Kementerian Agama.

2.5.5 Potensi Daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mengidentifikasi potensi strategis yang berada dalam kewenangannya. Potensi ini meliputi peran partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok strategis seperti mahasiswa dalam penguatan demokrasi, stabilitas sosial, serta ketahanan ideologi bangsa. Namun, potensi tersebut juga dihadapkan pada berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti meningkatnya konflik sosial, menurunnya partisipasi politik masyarakat, dan belum optimalnya peran kelembagaan demokrasi. Selain itu, terdapat isu-isu kebijakan hilir lintas sektoral (KHLS), isu lingkungan dinamis baik secara global, nasional, maupun regional yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu, pemetaan potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis berikut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan program prioritas perangkat daerah ke depan.

Table 17 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KHLS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Srategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
• Partai Politik • Sinergitas Ormas • Mahasiswa	• Meningkatnya konflik sosial • Menurunnya partispasi politik masyarakat • Belum optimalnya peran lembaga demokrasi • Menurunnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya • Menurunnya ketahanan ideologi dan dan wawasan kebangsaan • Menurunnya toleransi dan kesetaraan	Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif	1. Pendidikan 2. Kemiskinan' 3. Gender 4. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 5. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 6. Perubahan iklim	1. Kerusakan Hutan: Deforestasi, penebangan liar, dan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan 2. Krisis Air: Kekurangan air bersih, kualitas air yang buruk, dan persaingan sumber daya air 3. Perubahan Iklim:	1. Deforestasi atau penggundulan hutan. 2. Bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. 3. Moderasi beragama 4. Keamanan dan ketertiban 5. Keadilan ekonomi	1. Pencegahan dan penanganan konflik social 2. Meningkatnya kemitraan pengembangan lembaga demokrasi 3. Pembumian dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 4. Pembinaan kerukunan ummat beragama,

				Pemanasan global, perubahan pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut 4. Kemiskinan, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan,pendidikan, dan perlindungan sosia		antar suku, intrasuku, ras dan golongan lainnya

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesabangpol

3.1.1. Tujuan Badan Kesbangpol

Tujuan merupakan implementasi dari misi organisasi dan /menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Tujuan berfungsi sebagai pedoman untuk menetapkan arah pembangunan dalam jangka menengah, yaitu selama lima tahun. Tujuan disusun dengan berlandaskan visi dan misi serta mempertimbangkan hasil analisis strategis terhadap isu-isu utama. Meskipun tidak selalu dinyatakan secara kuantitatif, tujuan harus mencerminkan kondisi ideal yang menjadi sasaran di masa depan.

Tujuan ini kemudian menjadi dasar dalam merumuskan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang diperlukan untuk merealisasikan misi. Dengan mengacu pada kerangka misi yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merumuskan tujuan dan sasaran strategisnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 2025-2029.

Sebagai bagian dari perencanaan strategis tersebut, tujuan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah **Meningkatkan Ketahanan wilayah, yang diukur melalui Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD** (Gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

3.1.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran terukur dari tujuan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah yang ingin dicapai meliputi:

a. **Meningkatnya stabilitas politik**, sebagai dasar terciptanya harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

b. **Meningkatnya ketahanan bangsa**, yang mencakup penguatan nilai-nilai ideologi, wawasan kebangsaan, serta kerukunan sosial dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik.

Selain dari sasaran strategis tersebut, Provinsi Jawa Tengah juga telah merumuskan wa pembangunan jangka panjang 2025-2045 yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat sejahtera, berdaya saing global, dan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Sebagai bagian dari perwujudan visi ini, fokus utama pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian berbasis potensi lokal, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Secara keseluruhan, visi pembangunan jangka panjang Jawa Tengah 2025-2045 merupakan sebuah rencana besar yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk menciptakan provinsi yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Sasaran, indikator, dan target yang telah dirumuskan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kebijakan, sekaligus sebagai langkah nyata dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada masa depan.

Table 18 Provinsi jawa tengah memiliki sasaran visi, indikator dan target untuk periode tahun 2025-2045

Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per Kapita	Rp.Juta	49,30-68,86	63,71-68,86	101,22-106,30	157,13-162,19	230,77-276,24
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Angka	57,59	74,41	103,45	145,95	222,31
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	33,88-34,06	35,42-36,42	39,89-40,89	43,10-44,10	40,71-41,71
	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	%	9,00-9,66	7,25-7,90	5,06-5,71	2,88-3,53	0,25-0,75
		Rasio Gini	Angka	0,362-0,367	0,351-0,362	0,336-0,358	0,321-0,353	0,301-0,345
		Kontribusi PDRB Provinsi	%	8,25	4,92	5,00	5,60	6,82
		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90-5,60	5,00-5,70	5,20-6,10	5,40-6,30	4,48-5,53
	Kepemimpinan dan pengaruh internasional meningkat	Kapasitas Intitusi	Angka	4,59	4,7	4,79	4,87	4,92
	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	Angka	0,59	0,60	0,62	0,67	0,80

Untuk detail lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran, indikator, dan target yang direncanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada periode 2025-2029, informasi tersebut disajikan secara lengkap dalam tabel berikut.

Table 20 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis												
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	N/A	73,53	73,7	74	74,3	74,6	74,9	75	75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	86	90,25	88,15	88,17	88,2	89	90	91	91

		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah											
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	N/A	2,8	2,85	2,9	2,95	3	3,05	3,1	3,1
2	Meningkatkan Ketahanan Wilayah												
			Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD	Angka	3	3,01	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,06	3,06
		Meningkatnya Stabilitas Politik											
			Indeks Ketahanan Politik	Angka	3,08	3,11	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16	3,16
		Meningkatnya Ketahanan Bangsa											
			Indeks Harmoni Indonesia	Angka	N/A	N/A	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan perencanaan menyeluruh yang dirancang untuk memastikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perencanaan ini juga bertujuan untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan transformasi, reformasi, dan peningkatan kinerja birokrasi.

Lebih dari sekadar mengagendakan kegiatan pembangunan, strategi ini juga mencakup berbagai program yang bertujuan untuk menciptakan layanan masyarakat yang lebih baik, termasuk peningkatan kapasitas birokrasi, penyempurnaan sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek tetapi juga pada penguatan fondasi pembangunan jangka panjang.

Dalam penyusunan strategi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mengacu pada analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), yang mengidentifikasi:

1. **Kekuatan (Strengths):**
    - Dukungan kebijakan politik dari pemerintah pusat untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis.
    - Tersedianya regulasi dan pedoman pelaksanaan di tingkat pusat maupun daerah yang mendukung peningkatan kinerja.
    - Komitmen serta kompetensi sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. **Kelemahan (Weaknesses):**
    - Ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia dengan beban kerja.
    - Keterbatasan sarana dan prasarana operasional.
3. **Peluang (Opportunities):**
    - Kehadiran lembaga mitra seperti BNPT, BPIP, organisasi masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan serta yang dapat dioptimalkan kerjasamanya.

- Meningkatnya komunikasi politik antara infrastruktur dan suprastruktur politik.
- Berkembangnya organisasi masyarakat (ormas) sebagai aset pembangunan daerah.
- Potensi pengembangan budaya lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.

4. **Ancaman (Threats):**
   - Percepatan globalisasi, keterbukaan informasi, dan perkembangan teknologi yang pesat.
   - Potensi konflik yang meningkat menjelang pemilu serentak.
   - Terjadinya konflik sosial dan menurunnya peran organisasi kemasyarakatan.
   - Tantangan mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan antar Provinsi yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, berikut adalah strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029:

1. **Optimalisasi cakupan pendidikan politik, etika, dan budaya secara komprehensif dan berkelanjutan.**
   Kebijakan:
   - Peningkatan pemahaman demokrasi, terutama bagi generasi milenial dan pemilih pemula.
   - Fasilitasi dan penguatan organisasi kemasyarakatan serta organisasi politik.
   - Penguatan pemantauan situasi politik, khususnya pada pelaksanaan pemilu serentak.
   - Peningkatan cakupan pendidikan politik yang melibatkan nilai-nilai etika dan budaya politik.
2. **Optimalisasi koordinasi penanganan konflik sosial untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat.**
   Kebijakan:
   - Penguatan pengawasan terhadap individu atau lembaga asing serta peningkatan kewaspadaan dini.

- Akselerasi penanganan dan penyelesaian konflik sosial di tingkat daerah.

3. **Optimalisasi pengamalan pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).**
   Kebijakan:
   - Peningkatan cakupan pendidikan dan pelatihan ideologi kebangsaan.
   - Penguatan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, dan rasa cinta tanah air.
   - Peningkatan kapasitas Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
   - Upaya counter terhadap ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
   - Penguatan kerukunan umat beragama dan pembuaran kebangsaan serta filtrasi terhadap ekstrimisme.
4. **Penguatan kohesi sosial masyarakat.**
   Kebijakan:
   - Penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai pendorong kohesi dan ketahanan sosial.
   - Sinergitas organisasi masyarakat dalam menjaga toleransi beragama dan etnisitas, serta pengembangan seni dan budaya.
   - Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan pemantapan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).
5. **Penguatan pengawasan dan monitoring kinerja perangkat daerah.**
   Kebijakan:
   - Peningkatan mekanisme pengawasan dan penguatan evaluasi kinerja perangkat daerah.
6. **Optimalisasi kapasitas kelembagaan perangkat daerah.**
   Kebijakan:
   - Peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah.
   - Pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran dan kepegawaian.

Strategi dan arah kebijakan tersebut mencerminkan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk terus memperkuat stabilitas politik, keamanan, serta ketahanan sosial budaya, sehingga mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026 disajikan pada tabel berikut:

Table 20 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketahanan Wilayah	Meningkatnya stabilitas politik	Optimalisasi cakupan pendidikan politik, etika dan budaya secara komprehensif dan berkelanjutan	Peningkatan pemahaman demokrasi utamanya bagi kaum milenial dan pemilih pemula
			Fasilitasi dan penguatan struktur organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik
			penguatan kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
			Penguatan pemantauan situasi politik khususnya dalam pelaksanaan pemilu serentak
			Penguatan cakupan penyelenggaraan pendidikan politik, etika dan budaya politik
		Optimalisasi koordinasi penanganan konflik sosial dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan di masyarakat	Penguatan pengawasan orang/lembaga asing dan peningkatan bidang kewaspadaan dini
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menangani konflik sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Akselerasi penanganan dan peredaman konflik sosial daerah
	Meningkatnya ketahanan bangsa	Optimalisasi pengamalan pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika)	Peningkatan penyelenggaraan dan cakupan pendidikan dan pelatihan pemahaman ideologi dan kebangsaan
			Penguatan karakter bangsa/ wawasan kebangasaan dan Rasa Cinta Tanah Air
			Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila
			Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
			Peningkatan Kapasitas Pusat Pendidikan Wawasan Kebangasaan
			Peningkatan upaya counter ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan filtrasi terhadap ekstrimisme dan penguatan kerukunan umat beragama dan pembuaran kebangsaan
		Penguatan kohesi sosial masyarakat	Penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai pengungkit kohesi dan ketahanan sosial
			Sinergitas Ormas dalam menjaga toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya
			Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN dan PN
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Penguatan pengawasan dan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan mekanisme pengawasan dan penguatan evaluasi kinerja.
			Peningkatan pelaporan kinerja perangkat daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Optimalisasi kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah
			peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi
			Peningkatan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran dan kepegawaian

Table 21 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"	"Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan Dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi"	"Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa Dan Industri Hijau"	• "Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan"	"Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan"
• Pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban • Optimalisasi pemetaan daerah rawan • Peningkatan sinergi dan koordinasi antar anggota Forkompinda serta optimalisasi peran	• Peningkatan pembinaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban • Penguatan pemetaan daerah rawan konflik • Peningkatan sinergi dan koordinasi antar anggota Forkompinda serta optimalisasi	• Pengembangan kapasitas masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban • Peningkatan pemetaan daerah rawan konflik • Peningkatan sinergi dan koordinasi antar anggota Forkompinda serta	• Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban • Peningkatan pemetaan daerah rawan konflik • Peningkatan sinergi dan koordinasi antar anggota Forkompinda serta optimalisasi	• Perwujudan masyarakat yang aktif dalam menjaga keamanan serta perwujudan daerah yang aman dan kondusif • Peningkatan sinergi dan koordinasi antar anggota Forkompinda serta optimalisasi

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
anggota Forkompinda • Peningkatan kapasitas partai politik dalam pemajuan demokrasi; • Penguatan lembaga demokrasi dan menjaga ekosistem yang demokratis • Internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila, serta pengembangan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara dan Masyarakat;	peran anggota Forkompinda • Peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi • Penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah • Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme	optimalisasi peran anggota Forkompinda • Peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi; • Penguatan kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; • Penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem kolaboratif berlandaskan nilai-nilai Pancasila	peran anggota Forkompinda • Pembentukkan ekosistem pengawasan proses demokrasi termasuk proses pemilu yang berbasis pada partisipasi masyarakat • Memperkuat upaya penjaminan hak masyarakat untuk dapat memilih dan dipilih dalam pemilu • Membudayakan nilai-nilai pancasila sebagai modal sosial • Penguatan kesetaraan akses organisasi masyarakat pada	peran anggota Forkompinda • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengawasan pemilu yang jujur dan adil • Menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai modal sosial sebagai penguat kohesi sosial • Peningkatkan kualitas perencanaan untuk meminimalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
• Penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi; • Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah	• Meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakat dalam mendukung Pembangunan • Peningkatkan kegiatan deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa	• Peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda. • Peningkatkan pelayanan untuk menjamin kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap keikutsertaan ormas pada pembangunan • Peningkatkan kerjasama antar institusi dalam upaya pemberantasan narkoba	sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial ormas dalam proses pemilihan umum • Penguatan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika"	

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Pada dasarnya Manajemen Risiko sudah harus diterapkan di seluruh instansi pemerintah berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah menerapkan manajemen risiko dalam bentuk kegiatan antara lain mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan penilaian risiko berupa identifikasi risiko dan analisis risiko dan menyusun sistem informasi yang mendukung pelaporan atas penilaian risiko secara periodik. Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut :

Table 22 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Resiko Strategis Perangkat Daera Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN								
Sasaran Strategis PD	**Indikator Kinerja PD**	**Pernyataan Risiko**	**Skala Risiko**	**Sebab**	**Dampak**	**RTP**	**Penanggungjawab**	**Target Waktu Penyelesaian**
Meningkatnya stablitas politik	Indeks Ketahanan Politik	Unjuk rasa anarkis	16	Kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.	Kondusivitas daerah terganggu	1. FGD yang melibakan tokoh-tokoh masyarakat dan Tokoh Agama	Kepala Badan	5 tahun

				Kesejangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	kerusakan Fasilitas umum	2. Pelatihan dan kerja sama bidang Intelijen		5 tahun
				Kinerja elit politik yang dinilai buruk oleh masyarakat	Terganggunya aktivitas ekonomi di wilayah yang terdampak	3. Rapat rutin Forkompinda		5 tahun
				Aparat keamanan menggunakan cara represif dibandingkan dialogis dan kultural dalam menghadapi tuntutan masyarakat	Meningkatnya konflik sosial	4. Dialog dengan mahasiswa dalam rangka menyerap aspirasi		5 tahun
				Perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok masyarakat				
		Polarisasi	16	Perbedaan pandangan dan keyakinan	Stabilitas politik terganggu	1. Membentuk	Kepala Badan	5 tahun

				terhadap isu politik tertentu.		Jejaring Sindikasi Konten Positif		
				Rendahnya literasi politik dan literasi digital masyarakat	Meningkatnya konflik sosial	2. Pelatihan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan		5 tahun
				Pemerintah dan media yang tidak berpihak/netral	Terjadinya konflik horizontal di masyarakat	3. Pelaksanaan kegiatan Jambore Harmoni Jawa Tengah		5 tahun
				Narasi hoaks, narasi kebencian dan political buzzer	Rendahnya kepecayaan publik pada institusi pemerintah			
				Kurangnya konsolidasi dan koordinasi antar elemen pilar demokrasi dan kelompok strategis	Kerentanan kohesiantar civil society			

Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Harmoni Indonesia	Disintegrasi sosial	16	Adanya ketimpangan sosial di masyarakat	Hubungan sosial antar kelompok masyarakat menjadi tidak harmonis	1. Penguatan kontra radikalisme dan ekstriminsme bagi masyarakat	Kepala Badan	5 tahun
				Konflik SARA	Integrasi sosial menjadi terancam (perpecahan bangsa)	2. Festival Ormas		5 tahun
				Rendahnya implementasi nilai-nilai Pancasila	Meningkatnya intoleransi	3. Pembinaan dan penguatan ormas lintas etnis		5 tahun
					Hilangnya nilai sosial didalam masyarakat			
					Munculnya paham terorisme dan ekstremisme			
		Meningkatnya penyalagunaan narkoba	16	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai	Tingkat kejahatan dan penyakit	1. Membentuk relawan dan satgas anti narkoba di Perguruan Tinggi	Kepala Badan	5 tahun

				dampak buruk narkoba	sosial meningkat			
				Lemahnya pengawasan terutama dari pemerintah	Rusaknya mental generasi muda	2 Pencegahan dan melawan narkoba melalui ketahanan budaya		5 tahun
				Beban masalah perekonomian yang semakin sulit				
		Terganggunya harmoni di masyarakat	16	ketidaksetaraan sosial dan ekonomi	Munculnya konflik sosial	1. Sarasehan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Kepala Badan	5 tahun
				Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian	Intoleransi	2. Membentuk forum penguatan moderasi beragama dan wasbang		5 tahun
				kurangnya pemahaman terhadap keberagaman	Menghambat pembangunan			

				Persaingan atas sumber daya alam				
		Tindak pidana korupsi	10	Beberapa peraturan pemerintah yang mengatur pemberian hibah masih perlu diperjelas	Kerugian keuangan Negara.	1. Membuat petunjuk pelaksanaan penggunaan hibah dari hasil evaluasi setiap tahunnya	Kepala Badan	5 tahun
				Dana hibah seringkali disalahgunakan untuk keperluan pribadi, kampanye politik, atau bahkan untuk kepentingan LSM fikti	Merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan hibah	2. Penyempurnaan Penggunaan aplikasi untuk meminimalkan terjadinya proses kecurangan		5 tahun
				Kurangnya transparansi dalam proses pemberian hibah	kegagalan pelaksanaan kegiatan yang didanai hibah			

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis ini juga sejalan dengan indikator capaian supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia yang tercantum dalam RPJPN 2025–2045, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Table 23 Indikator Capaian Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia dalam RPJPN 2025-2045

Arah (Tujuan Pembangunan)	**Indikator**		**Baseline 2025**	**Sasaran 2045**
Hukum Berkeadilan Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	28	Indeks Pembangunan Hukum	0,60 (2021)	0,84
	29	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	80,0
	30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)
Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Pajak Terhadap PDB (%)	10,0-12,-	18,0-20,0
	32	Tingkat Inflasi (%)	2,5+1	2,0+1
	33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
		a. Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200
		b. Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,6	60
		c. Aset Asuransi/PDB(%)	9,1	20
		d. Kapitalisasi Pasar Modal (%)	57,8	120
		e. Total Kredit/PDB (%)	37,8	80-90
	34	Inklusi Keuangan (%)	91	98

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35	Asia Power Index *(Diplomatic Influence)*	60,4 (2023)	75,0-80,0
	36	Asia Power Index *(Military Capability)*	24,6 (2023)	45,0

Sedangkan menurut RPJPD Provinsi Jawa Tengah, Sasaran Visi, Indikator dan Target Provinsi Jawa Tengah 2025-2045

Table 24 Sasaran Visi, Indikator dan Target Provinsi Jawa Tengah 2025-2045

Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	*Baseline* 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per Kapita	Rp. Juta	49,30-49,73	63,71-68,86	101,22-106,30	157,13-162,19	230,77-276,24
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Angka	57,59	74,41	103,45	145,95	222,31
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	33,88-34,06	35,42 - 36,42	39,89 - 40,89	43,10 - 44,10	40,71-41,71
	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	%	9,00-9,66	7,25-7,90	5,06-5,71	2,88-3,53	0,25-0,75
		Rasio Gini	Angka	0,362-0,367	0,351-0,362	0,336-0,358	0,321-0,353	0,301-0,345
		Kontribusi PDRB Provinsi	%	8,25	4,92	5,00	5,60	6,82
		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90-5,60	5,00-5,70	5,20-6,10	5,40-6,30	4,48 - 5,53
	Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi	Angka	4,59	4,7	4,79	4,87	4,92
	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	Angka	0,59	0,60	0,62	0,67	0,80
	Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Penurunan intensitas emisi GRK	%	0,32	27,57	58,38	72,81	82,75
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	75,68	75,87	76,11	76,36	79,58

Sedangkan keterkaitan antara permasalahan, isu strategis daerah, visi, misi, fokus kerja, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tertuang dalam tabel berikut pada RPJMD 2025-2029 seperti tabel di bawah ini

Tabel 25 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2026–2030

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan										
	Tingkat Kemiskinan	%	9,58	9,66 - 9,00	8,70 - 8,53	8,51 - 8,17	8,38 - 7,81	8,20 - 7,48	8,00 - 7,13	8,00 - 7,13
	PDRB Per Kapita	Juta Rp	47,97	49,3 - 51,1	52,0 - 55,0	56,0 - 59,8	61,0 - 65,3	67,0 - 71,8	73,0 - 78,4	73,0 - 78,4
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	91,28	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,00
Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah										
	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,47	80,97	80,97	82,25	82,25	84,23	84,23	84,23
	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	n/a	85,81 – 89,07	86,46 - 89,50	86,80 - 90,22	86,91 - 91,95	87,20 – 90,45	88,61 - 90,82	88,61 - 90,82

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Otonomi Fiskal Daerah	%	66,91	63,56	65,72	66,80	67,89	68,90	69,84	69,84
Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan										
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	4,80 - 5,60	5,00 - 6,00	5,30 - 7,00	5,60 - 7,30	6,20 - 7,70	6,40 - 8,00	6,40 - 8,00
	Tingkat Inflasi	%	1,67	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,46	75,68	75,73	75,78	75,83	75,87	75,92	75,92
Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter										
	Indeks Modal Manusia	Angka	0,59	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,65
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,78	4,81 - 4,42	4,71 - 4,27	4,65 - 4,08	4,57 - 3,90	4,49 - 3,73	4,41 - 3,56	4,41 - 3,56

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 terdapat 5 (lima) Program, sebagaimana berikut :

1 **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
Indikator kinerja program atau outcome adalah persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun.
Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah :

- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN,
- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN,
- Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah,
- Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah
- Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah.

b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daera.
Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah

- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan
Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah

- Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi Kepegawaian
- Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
- Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi Kepegawaian
- Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja Pegawai
- Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
- Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan.

Sedangkan indikator sub kinerja sub kegiatan adalah

- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
- Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
- Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
- Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah
- Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan

Sedankan indikator kinerja sub kegiatan adalah :

- Jumlah paket mebel yang disediakan,
- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
- Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun.

Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah :

- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan
- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan

Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah :

- Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
- Jumlah mebel yang dipelihara
- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
- Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

2 **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan

Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
- Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah
- Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah

3 **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks Aktualisasi Pancasila, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah :
   - Persentase masyarakat yang paham pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa
   - Persentase Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

   Sedangkan indikator kinerja sub kegiatan adalah :
   - Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
   - Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
   - Jumlah laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
   - Jumlah orang Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

- Jumlah laporan hasil Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
- Jumlah laporan hasil Pelaksanaan tugas Paskibraka
- Jumlah orang yang mengikuti Pembentukan Paskibraka

4 **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks Kinerja Ormas, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah

- Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan ormas
- Persentase penanganan pengawasan ormas

Sedangkan indikator keluaran dari sub kegiatan adalah

- Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5 **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks Kinerja Ekonomi dan Indeks Toleransi, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Persentase masyarakat yang paham terhadap kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah
- Persentase Masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi

Sedangkan indikator keluaran dari sub kegiatan ini adalah

- Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan di daerah

6 **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Pol`itik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Jumlah Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik
- Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi
- Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik

Sedangkan indikator keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Jumlah laporan Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi politik di Daerah
- Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

7 **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks Kewaspadaan Nasional, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

   Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah:

   - Persentase penanganan konflik sosial
   - Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

   Sedangkan indikator keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

   - Jumlah orang Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
   - Jumlah orang Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
   - Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
   - Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Selanjutnya rincian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 26 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan Ketahanan Wilayah *												128.175.000.000		129.773.104.000		131.565.000.000		131.940.000.000		136.365.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD *	Angka	3,01	3,01	3,02		3,03		3,04		3,05		3,06		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Stabilitas Politik **											122.415.000.000		123.015.000.000		123.715.000.000		123.865.000.000		126.615.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Indeks Ketahanan Politik **	Angka	3,11	3,11	3,12	122.415.000.000	3,13	123.015.000.000	3,14	123.715.000.000	3,15	123.865.000.000	3,16	126.615.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK ***									95.915.000.000		96.265.000.000		96.515.000.000		96.590.000.000		97.215.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri	
						Terjaminnya hak-hak sipil dan hak-hak politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan ***	Angka	N/A	87,8	88,11	500.000.000	88,11	750.000.000	88,11	900.000.000	88,11	975.000.000	88,11	1.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri	
		8.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik ****								500.000.000		750.000.000		900.000.000		975.000.000		1.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri	
						Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi ****	%	N/A	89,5	89,6	200.000.000	89,7	450.000.000	89,8	500.000.000	89,9	500.000.000	90	700.000.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	
		8.01.03.1.01.0002			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah *****							200.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		700.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri	

						Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Dokumen	4	4	4	200.000.000	4	450.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	700.000.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	Bidang Politik Dalam Negeri JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun *****															
						Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	Presentasi masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik ***	%	N/A	89,5	89,7	300.000.000	89,8	300.000.000	89,9	400.000.000	90	475.000.000	91	700.000.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	
		8.01.03.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah *****							300.000.000		300.000.000		400.000.000		475.000.000		700.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri	
						Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah *****	Orang	1.840	3.055	500	300.000.000	500	300.000.000	670	400.000.000	800	475.000.000	1.170	700.000.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	Bidang Politik Dalam Negeri JAWA TENGAH
						Meningkatnya kinerja dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi ***	Angka	N/A	79,43	80,47	95.415.000.000	80,71	95.515.000.000	80,96	95.615.000.000	81,99	95.615.000.000	81,99	95.815.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri	

		8.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik ** **								95.415.000.000		95.515.000.000		95.615.000.000		95.615.000.000		95.815.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri	
						Meningkatnya pemahaman kelembagaan partai politik	Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan	%	N/A	89,5	89,7	95.415.000.000	89,8	95.515.000.000	89,9	95.615.000.000	90	95.615.000.000	91	95.815.000.000	Pokja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							politik ****															
		8.01.03.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah *****								200.000.000		300.000.000		400.000.000		400.000.000		600.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri	
						Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah *****	Orang	180	120	335	200.000.000	500	300.000.000	670	400.000.000	670	400.000.000	1.000	600.000.000	Pokja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik	Bidang Politik Dalam Negeri JAWA TENGAH

		8.01.03.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah *****							95.215.000.000		95.215.000.000		95.215.000.000		95.215.000.000		95.215.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri	
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah *****	Laporan	4	12	8	95.215.000.000	8	95.215.000.000	10	95.215.000.000	10	95.215.000.000	10	95.215.000.000	Pokja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik	Bidang Politik Dalam Negeri JAWA TENGAH
		8.01.06	PROGRAM P ENINGKATA N KEWASPA DAAN NASIONAL DAN PENING KATAN									26.500.000.000		26.750.000.000		27.200.000.000		27.275.000.000		29.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik -Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			KUALITAS DAN FASILITASI P ENANGANA N KONFLIK SOSIAL ***																			
						Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka penanganan konflik sosial serta menjaga kondusifitas wilayah	Indeks Kewaspadaan Nasional ***	Angka	-	73,5	74	26.500.000.000	74,5	26.750.000.000	75	27.200.000.000	75,5	27.275.000.000	76	29.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik -Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
		8.01.06.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial ****								26.500.000.000		26.750.000.000		27.200.000.000		27.275.000.000		29.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik -Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
						Tertanganinya Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani *****	%	100	100	100	24.800.000.000	100	24.900.000.000	100	25.000.000.000	100	25.100.000.000	100	26.700.000.000	Pokja Penanganan Konflik	

		8.01.06.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah *****							300.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
						Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah * ****	Orang	N/A	3.500	670	300.000.000	700	400.000.000	833	500.000.000	1.170	600.000.000	1.350	700.000.000	Pokja Penanganan Konflik	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik JAWA TENGAH
		8.01.06.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,							24.500.000.000		24.500.000.000		24.500.000.000		24.500.000.000		26.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah *****																		
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah * ****	Laporan	N/A	4	4	24.500.000.000	4	24.500.000.000	4	24.500.000.000	4	24.500.000.000	4	26.000.000.000	Pokja Penanganan Konflik	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik JAWA TENGAH

						Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Kewaspadaan Nasional	Persentase masyarakatyang paham terhadap Kewaspadaan Nasional ****	%	N/A	77	80	1.700.000.000	83	1.850.000.000	86	2.200.000.000	89	2.175.000.000	90	2.700.000.000	Pokja Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	
		8.01.06.1.01.0002			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah *****							200.000.000		200.000.000		250.000.000		200.000.000		200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik -Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
						Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun *****	Dokumen	N/A	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	Pokja Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik JAWA TENGAH
		8.01.06.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,							300.000.000		350.000.000		550.000.000		475.000.000		800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik -Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah *****																	

						Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah * ****	Orang	N/A	3.500	500	300.000.000	583	350.000.000	750	550.000.000	700	475.000.000	1.350	800.000.000	Pokja Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik JAWA TENGAH
		8.01.06.1.01.0006			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi *****							1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		1.700.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik -Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
						Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi *****	Dokumen	N/A	4	12	1.200.000.000	12	1.300.000.000	12	1.400.000.000	12	1.500.000.000	12	1.700.000.000	Pokja Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik JAWA TENGAH
	Meningkatnya Ketahanan Bangsa **											5.760.000.000		6.758.104.000		7.850.000.000		8.075.000.000		9.750.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Indeks Harmoni Indonesia **	Angka	N/A	6,4	6,5	5.760.000.000	6,6	6.758.104.000	6,7	7.850.000.000	6,8	8.075.000.000	6,9	9.750.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN ***									1.160.000.000		1.510.000.000		1.800.000.000		1.875.000.000		2.250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
						Meningkatnya pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Indeks Aktualisasi Pancasila ***	Angka	N/A	75,53	76,31	1.160.000.000	77,09	1.510.000.000	77,87	1.800.000.000	78,65	1.875.000.000	78,66	2.250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
		8.01.02.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ****								1.160.000.000		1.510.000.000		1.800.000.000		1.875.000.000		2.250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
						Meningkatnya pemahaman pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa	Prosentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa * ***	%	N/A	85	86	90.000.000	87	140.000.000	88	150.000.000	89	225.000.000	90	500.000.000	Pokja Bela Negara dan Karakter Bangsa	
		8.01.02.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di							40.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi,	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan *** **																Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	

						Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan *****	Orang	N/A	3.600	70	40.000.000	100	90.000.000	170	100.000.000	170	100.000.000	340	200.000.000	Pokja Bela Negara dan Karakter Bangsa	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		125.000.000		300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
						Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan *****	Laporan	4	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	125.000.000	4	300.000.000	Pokja Bela Negara dan Karakter Bangsa	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa JAWA TENGAH
						Meningkatnya pemahaman masyarakat yang paham terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ****	%	N/A	85	86	1.070.000.000	87	1.370.000.000	88	1.650.000.000	89	1.650.000.000	90	1.750.000.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
		8.01.02.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*****							300.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
						Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	Orang	N/A	2.000	500	300.000.000	670	400.000.000	670	400.000.000	670	400.000.000	840	500.000.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan *****																
		8.01.02.1.01.0007			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila *****							20.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	

						Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila *** **	Orang	N/A	35	35	20.000.000	35	20.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.0008			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibrak a *****							30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
						Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka * ****	Dokumen	N/A	4	4	30.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.0009			Pelaksanaan tugas Paskibraka *****							20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
						Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka *****	Dokumen	N/A	4	4	20.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.0012			Pembentukan Paskibraka *****							700.000.000		850.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
						Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka *****	Orang	N/A	70	70	700.000.000	70	850.000.000	70	1.100.000.000	70	1.100.000.000	70	1.100.000.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa JAWA TENGAH
		8.01.04	PROGRAM P EMBERDAY AAN DAN PE NGAWASAN ORGANISASI KEMASYARA KATAN ***									3.850.000.000		4.200.000.000		4.700.000.000		4.775.000.000		5.500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
						Meningkatnya peran strategis ormas dan kemandirian ormas dalam mendukung pembangunan	Indeks Kinerja Ormas ***	Angka	80	77,87	78,26	3.850.000.000	78,91	4.200.000.000	79,34	4.700.000.000	81	4.775.000.000	82	5.500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.04.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n ****								3.850.000.000		4.200.000.000		4.700.000.000		4.775.000.000		5.500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
						Meningkatnya kemandirian ormas dalam rangka menunjang pembangunan daerah	Persentase Masyar akat yangpaham te rhadappemberdaya an Ormas ****	%	N/A	85	86	600.000.000	87	950.000.000	88	1.200.000.000	89	1.275.000.000	90	1.500.000.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.04.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan							300.000.000		450.000.000		600.000.000		675.000.000		800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah *****																Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	

						Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ** ***	Orang	1.200	3.200	500	300.000.000	750	450.000.000	1.000	600.000.000	1.130	675.000.000	1.130	800.000.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan JAWA TENGAH
		8.01.04.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah *****							300.000.000		500.000.000		600.000.000		600.000.000		700.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
						Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ** ***	Orang	320	200	500	300.000.000	670	500.000.000	1.000	600.000.000	1.000	600.000.000	1.170	700.000.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan JAWA TENGAH
						Meningkatnya pengawasan ormas dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah	Persentase Penanganan Pengawasan Ormas ****	%	N/A	100	100	3.250.000.000	100	3.250.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	4.000.000.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.04.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah *****							3.250.000.000		3.250.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
						Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ** ***	Laporan	35	4	4	3.250.000.000	4	3.250.000.000	4	3.500.000.000	4	3.500.000.000	4	4.000.000.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Daerah																
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA ***									750.000.000		1.048.104.000		1.350.000.000		1.425.000.000		2.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	

						Meningkatnya moderasi beragama di masyarakat	Indeks Toleransi ***	Angka	76,76	74,3	75,4	500.000.000	76,5	798.104.000	77,6	900.000.000	78,7	975.000.000	79	1.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.05.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya ****								500.000.000		798.104.000		900.000.000		975.000.000		1.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
						Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ****	%	N/A	74,3	75,4	500.000.000	76,5	798.104.000	77,6	900.000.000	78,7	975.000.000	79	1.400.000.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		8.01.05.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah *****							300.000.000		500.000.000		500.000.000		575.000.000		800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
						Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah *****	Orang	1.210	2.400	500	300.000.000	835	500.000.000	835	500.000.000	960	575.000.000	1.340	800.000.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan JAWA TENGAH
		8.01.05.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah *****							200.000.000		298.104.000		400.000.000		400.000.000		600.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Laporan	12	12	4	200.000.000	4	298.104.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	600.000.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah *****																

						Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perekonomian	Indeks ketahanan Ekonomi ***	Angka	N/A	2,88	2,89	250.000.000	2,9	250.000.000	2,91	450.000.000	2,92	450.000.000	2,92	600.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.05.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya ****								250.000.000		250.000.000		450.000.000		450.000.000		600.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
						Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi	Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi ****	%	N/A	87	88	250.000.000	89	250.000.000	90	450.000.000	91	450.000.000	91	600.000.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		8.01.05.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah *****							250.000.000		250.000.000		450.000.000		450.000.000		600.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
						Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah *****	Orang	100	800	420	250.000.000	420	250.000.000	750	450.000.000	750	450.000.000	1.000	600.000.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik *												18.206.698.000		18.072.411.000		19.447.527.000		19.226.082.000		19.668.044.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik *	Angka	73,53	73,7	74		74,3		74,6		74,9		75		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **											16.463.771.000		16.315.667.000		17.397.527.000		17.176.082.000		17.531.082.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **	Angka	90,25	88,15	88,17	16.463.771.000	88,2	16.315.667.000	89	17.397.527.000	90	17.176.082.000	91	17.531.082.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH PROVINSI ***								16.463.771.000		16.315.667.000		17.397.527.000		17.176.082.000		17.531.082.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ***	%	100	100	100	16.463.771.000	100	16.315.667.000	100	17.397.527.000	100	17.176.082.000	100	17.531.082.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							10.393.771.000		9.945.667.000		10.113.926.000		9.917.481.000		9.917.481.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	12	12	10.393.771.000	12	9.945.667.000	12	10.113.926.000	12	9.917.481.000	12	9.917.481.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****						10.022.371.000		9.574.267.000		9.631.926.000		9.435.481.000		9.435.481.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ** ***	Orang/Bulan	54	62	62	10.022.371.000	62	9.574.267.000	62	9.631.926.000	62	9.435.481.000	62	9.435.481.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*****						350.000.000		350.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	350.000.000	12	350.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD *****						700.000		700.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	12	12	700.000	12	700.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ** ***						700.000		700.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	N/A	12	12	700.000	12	700.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwula nan/Semesteran SKPD *****						20.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	N/A	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								80.000.000		80.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	4	4	80.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD * ****							80.000.000		80.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	80.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								300.000.000		300.000.000		420.000.000		470.000.000		470.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	N/A	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	420.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian * ****							10.000.000		10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****							10.000.000		10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							40.000.000		40.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Pendidikan dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	Orang	80	80	50	40.000.000	50	40.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****															
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****							240.000.000		240.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	280	110	100	240.000.000	100	240.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								1.510.000.000		1.710.000.000		1.835.000.000		1.775.000.000		1.950.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ** **	%	N/A	100	100	1.510.000.000	100	1.710.000.000	100	1.835.000.000	100	1.775.000.000	100	1.950.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor *****							10.000.000		10.000.000		20.000.000		10.000.000		10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan * ****	Paket	12	12	6	10.000.000	6	10.000.000	6	20.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							150.000.000		150.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	12	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							150.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	175.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan * ****							80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan * ****	Paket	12	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026	2027	2028	2029	2030		

											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Undangan	Disediakan *****															
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu * ****	Laporan	12	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	125.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							850.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		950.000.000		1.100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	24	24	24	850.000.000	24	1.050.000.000	24	1.050.000.000	24	950.000.000	24	1.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							20.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	12	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							40.000.000		40.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	8	8	4	40.000.000	4	40.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								500.000.000		500.000.000		600.000.000		633.601.000		633.601.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerahyang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ** **	Unit	N/A	32	32	500.000.000	32	500.000.000	32	600.000.000	32	633.601.000	32	633.601.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan * ****							0		0		0		0		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan * ****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	5	8	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							400.000.000		400.000.000		500.000.000		533.601.000		533.601.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya	Jumlah Unit	Unit	27	27	30	400.000.000	30	400.000.000	30	500.000.000	30	533.601.000	30	533.601.000	SUB BAGIAN UMUM DAN	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub	Outcome/	Indikator	Satuan	Baseline	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun	Unit Kerja Perangkat	Lokasi

					Kegiatan	Output	Kinerja		Tahun 2024 (Realisasi)	Tahun 2025 (Target)	2026		2027		2028		2029		2030		Daerah Penanggungjawab	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan * ****														KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan * ****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								2.805.000.000		2.905.000.000		3.163.601.000		3.165.000.000		3.165.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	84	84	2.805.000.000	84	2.905.000.000	84	3.163.601.000	84	3.165.000.000	84	3.165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *** **	Laporan	12	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik * ****							500.000.000		500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	36	36	500.000.000	36	500.000.000	36	600.000.000	36	600.000.000	36	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor * ****							2.300.000.000		2.400.000.000		2.558.601.000		2.560.000.000		2.560.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	2.300.000.000	12	2.400.000.000	12	2.558.601.000	12	2.560.000.000	12	2.560.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								875.000.000		875.000.000		1.175.000.000		1.125.000.000		1.305.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	352	352	875.000.000	352	875.000.000	352	1.175.000.000	352	1.125.000.000	352	1.305.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau							300.000.000		300.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Kendaraan Dinas Jabatan * ****																	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	21	36	36	300.000.000	36	300.000.000	36	400.000.000	36	400.000.000	36	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	50	21	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara ** ***	Unit	80	80	60	120.000.000	60	120.000.000	60	120.000.000	60	120.000.000	60	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							350.000.000		350.000.000		500.000.000		500.000.000		600.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	350.000.000	1	350.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							100.000.000		100.000.000		150.000.000		100.000.000		150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	24	200	80	100.000.000	80	100.000.000	80	150.000.000	80	100.000.000	80	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **											1.742.927.000		1.756.744.000		2.050.000.000		2.050.000.000		2.136.962.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **	Angka	2,865	2,85	2,9	1.742.927.000	2,95	1.756.744.000	3	2.050.000.000	3,05	2.050.000.000	3,1	2.136.962.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.742.927.000		1.756.744.000		2.050.000.000		2.050.000.000		2.136.962.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ***	%	100	100	100	1.742.927.000	100	1.756.744.000	100	2.050.000.000	100	2.050.000.000	100	2.136.962.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								1.742.927.000		1.756.744.000		2.050.000.000		2.050.000.000		2.136.962.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	100	1.742.927.000	100	1.756.744.000	100	2.050.000.000	100	2.050.000.000	100	2.136.962.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							1.100.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.236.962.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	16	17	16	1.100.000.000	16	1.100.000.000	16	1.150.000.000	16	1.150.000.000	17	1.236.962.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							602.927.000		616.744.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	20	21	20	602.927.000	20	616.744.000	20	800.000.000	20	800.000.000	21	800.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							20.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	4	20.000.000	4	20.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							20.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terselenggaran ya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	3	20.000.000	3	20.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Table 27 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Nomenklatur Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	1. Pembentukan Paskibraka dan Pembangunan Karakter dan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Purna Paskibraka Jateng	350 orang	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		2. Sosialisasi tatap muka terkait pendidikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	11.650 orang	
		3. Fasilitasi Sekolah Damai	4 kegiatan	
		1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan	4 kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		1. Pelatihan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan dalam organisasi kepemudaan	4 kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
2.	Penguatan dan promosi moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri	1. Mempromosikan keberagaman dan keharmonisan di tengah masyarakat global	4 kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3.	Mendorong penguatan Forum Kerukunan Antar Ummat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan	1. Fasilitas kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah	4 kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		2. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan	4 kegiatan	
		3. Rembug Jagong Tokoh Agama dan Penghayat Kepercayaan	4 kegiatan	

		1. Hibah FKUB	5 laporan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		2. Penguatan Ormas Lintas Etnis "Nge-camp Kebangsaan"	1 kegiatan	
		3. Festival Ormas	1 kegiatan	
		4. Hibah FPK	4 laporan	
		1. Fasilitas kegiatan kepada Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah	4 kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		2. Jambore : Harmoni Jawa Tengah	1 kegiatan	
		3. Penguatan Kontra Radikalisme Ekstrimisme Bagi Masyarakat	4 kegiatan	
		4. Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Lintas Etnis	4 kegiatan	
		5. Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	4 kegiatan	
4.	Program Kerjasama Forkompinda	1. Rapat rutin atau khusus untuk membahas isu-isu penting di daerah dan menyepakati langkah-langkah penanganan yang terkoordinasi	32 laporan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		2. Peningkatan monitoring pengawasan orang asing di Jawa Tengah	20 laporan	
		3. Tim Kewaspadaan Dini Provinsi Jawa Tengah	20 laporan	
		4. Hibah Instansi Vertikal	20 laporan	
		5. Penanganan Konflik Sosial di wilayah Jawa Tengah	20 laporan	
5.	Jawa Tengah Bebas Narkoba	1. Edukasi anti narkoba melalui kegiatan sosialisasi tatap muka, media sosial dan spanduk serta membentuk relawan dan satgas anti narkoba	4.600 orang	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6.	Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan	1. Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Perempuan dan kelompok rentan	4 kegiatan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		2. Forum Penguatan Demokrasi	4 kegiatam	
		3. Pendidikan Politik Warga Negara	4 kegiatan	
		4. Youth Politic Class	4 kegiatan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Indikator ini dirancang untuk mengukur hasil yang diperoleh dari pelaksanaan berbagai jenis pelayanan yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) melalui standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Standar pelayanan tersebut disusun sebagai upaya menjamin kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara konseptual, indikator kinerja mencakup ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan program atau kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai landasan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelayanan di berbagai tahap pelaksanaan, yaitu:

1. **Tahap perencanaan (ex-ante)**: Indikator digunakan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan program atau kebijakan sebelum implementasi, termasuk analisis kesiapan sumber daya dan strategi pelaksanaan.
2. **Tahap pelaksanaan (on-going)**: Indikator digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi selama proses pelaksanaan berlangsung, sehingga memungkinkan perbaikan atau penyesuaian apabila terjadi penyimpangan atau kendala.
3. **Tahap pasca-implementasi (ex-post)**: Indikator digunakan untuk menilai dampak atau hasil akhir dari program atau kebijakan setelah selesai dilaksanakan, termasuk sejauh mana hasil tersebut relevan dan berkelanjutan.

Dalam konteks Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, indikator kinerja untuk periode 2024–2029 dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja langsung yang menggambarkan capaian nyata selama periode tiga tahun tersebut, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah meliputi **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, yang merupakan ukuran keberhasilan strategis terhadap tujuan dan sasaran utama perangkat daerah. IKU memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi organisasi serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Penetapan IKU ini juga memberikan arahan yang jelas bagi OPD dalam menyusun dan melaksanakan program kerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dokumen perencanaan strategis ini memungkinkan fleksibilitas dalam implementasinya, termasuk penyempurnaan indikator kinerja seiring dengan perkembangan kondisi objektif dan dinamika kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga instrumen adaptif untuk mendukung keberhasilan kebijakan yang lebih luas.

Keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta masyarakat. Dengan dukungan yang terintegrasi, indikator kinerja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencapai pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Sementara Indikator kinerja perangkat daerah meliputi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah selengkapnya sebagai berikut:

Table 28 Penetapan Indiator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD**	**-**	**-**	**3,01**	**3,02**	**3,03**	**3,04**	**3,05**	**3,06**	

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	a. Indeks Ketahanan Politik	-	-	**3,11**	**3,12**	**3,13**	**3,14**	**3,15**	**3,16**	
	b. Indeks Harmoni Indonesia	-	-	**6,4**	**6,5**	**6,6**	**6,7**	**6,8**	**6,9**	
2	**Nilai Kepuasaan Masyarakat**	**86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Indeks Reformasi Birokrasi		**73,53**	**73,70**	**74,00**	**74,30**	**74,60**	**74,90**	**75,00**	
	a. Nilai Kepuasaan Masyarakat	86	90,25	88,15	88,17	88,20	89,00	90,00	91,00	
	b. Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,50	-	-	-	-	-	-	-	

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	c. Indeks Manajemen Resiko	-	2,865	2,85	2,9	2,95	3	3,05	3,1	

Dari Indikator Kinerja Utama OPD, kemudian dirumuskan kembali sesuai Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD yang termuat dalam Indikator Program, sebagaimana tabel terlampir

Table 29 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Aktualisasi Pancasila			75,54	76,31	77,09	77,87	78,65	78,66	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		3,60	75,54	76,31	77,09	77,87	78,65	78,66	
2	Indeks Kinerja Ormas			77.87	78,26	78,91	79,34	81	82	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan		80							

No	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Organisasi Kemasyarakatan									
3	Indeks Toleransi		76,76	74,30	75,40	76,50	77,60	78,70	79	
	Indeks Ketahanan ekonomi			2,88	2,89	2,90	2,91	2,92	2,92	-
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		3,21							
4	IDI Aspek Kebebasan			87,8	88,11	88,11	88,11	88,11	88,11	
	IDI Aspek Lembaga Demokrasi			79,43	80,47	80,71	80,96	81,99	81,99	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik									

No	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Indeks kewaspadaan Nasional **			73,5	74	74,5	75,00	75,5	76	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		80,60							

Table 30 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja SPM	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NIHIL										

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen penting yang mencerminkan komitmen dalam perencanaan dan pengelolaan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan arahan strategis kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), baik internal maupun eksternal, agar dapat berkontribusi secara aktif dalam mendukung penguatan dan pembangunan di sektor kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Jawa Tengah.

Renstra ini dirancang dengan fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap dinamika situasi yang mungkin terjadi. Sasaran-sasaran yang termuat di dalamnya dapat berubah sewaktu-waktu guna menyesuaikan dengan kondisi objektif yang berkembang, terutama ketika menghadapi kebutuhan strategis yang mendesak. Dengan sifat yang responsif ini, Renstra menjadi alat perencanaan yang relevan untuk menjawab tantangan dan peluang yang muncul di masa mendatang.

Target dan sasaran yang tertuang dalam Renstra mencakup tidak hanya sasaran strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Setiap unit kerja memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan sasaran tersebut ke dalam kegiatan operasional yang relevan dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hasilnya kemudian dirumuskan dalam bentuk **Rencana Kerja (Renja) Tahunan**, yang menjadi panduan untuk melaksanakan tugas secara terarah dan sistematis.

Pengendalian dan pengawasan terhadap implementasi Renstra dilakukan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkungan instansi, yang bekerja secara kolektif untuk memastikan program-program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan sinergi antara perencanaan strategis dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Dokumen ini juga bersifat dinamis, memungkinkan adanya revisi dan

penyempurnaan guna mengatasi berbagai kekurangan yang mungkin muncul dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Renstra tidak hanya menjadi panduan kerja tetapi juga alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Semua target yang telah dirumuskan dalam Renstra ini dapat tercapai dengan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup, dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh dalam penyusunan perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Dengan arahan dan tujuan yang jelas, Renstra ini akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dirancang demi kemajuan Provinsi Jawa Tengah.

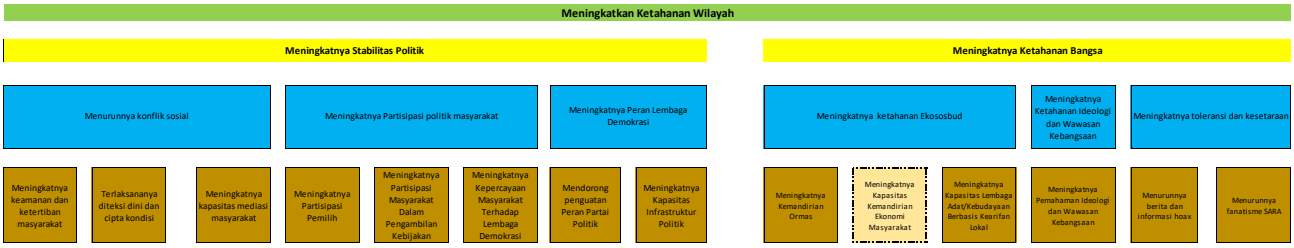
Meningkatkan Ketahanan Wilayah
Meningkatnya Stabilitas Politik
Meningkatnya Ketahanan Bangsa
Menurunnya konflik sosial
Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat
Meningkatnya Peran Lembaga Demokrasi
Meningkatnya ketahanan Ekososbud
Meningkatnya Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya toleransi dan kesetaraan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
Terlaksananya diteksi dini dan cipta kondisi
Meningkatnya kapasitas mediasi masyarakat
Meningkatnya Partisipasi Pemilih
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan
Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Demokrasi
Mendorong penguatan Peran Partai Politik
Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Politik
Meningkatnya Kemandirian Ormas
Meningkatnya Kapasitas Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Adat/Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal
Meningkatnya Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Menurunnya berita dan informasi hoax
Menurunnya fanatisme SARA

CASCADING KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2029

TUJUAN

Meningkatkan Ketahanan wilayah
IK: Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD

SASARAN

Meningkatnya Stabilitas Politik
IK : Indeks Ketahanan Politik

Meningkatnya Ketahanan Bangsa
IK : Indeks Harmoni Indonesia

PROGRAM	Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	IDI Aspek Kebebasan	IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Indeks Kewaspadaan Nasional		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indek Aktualisasi Pancasila		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Toleransi	indeks Ketahanan Ekonomi	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	
KEGIATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Presentasi masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik	persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan Ormas	Persentase Penanganan Pengawasan Ormas
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang di Bidang di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Jumlah orang Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila						
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Fasilitasi Forkopimda (laporan)	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Jumlah laporan hasil Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka								
							Pelaksanaan tugas Paskibraka		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan tugas Paskibraka								
							Pembentukan Paskibraka		Jumlah orang yang mengikuti Pembentukan Paskibraka								

TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

No	Jenis Konteks Resiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Resiko	Kategori Resiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	Risiko Strategis OPD	Meningkatnya stablitas politik	Indeks Ketahanan Politik	Unjuk rasa anarkis	Resiko Strategis	Kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.	Kondusivitas daerah terganggu	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
						Kesejangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	Kerusakan Fasilitas umum	
						Kinerja elit politik yang dinilai buruk oleh masyarakat	Terganggunya aktivitas ekonomi di wilayah yang terdampak	
						Aparat keamanan menggunakan cara represif dibandingkan dialogis dan kultural dalam menghadapi tuntutan masyarakat	Meningkatnya konflik sosial	
						Perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok masyarakat		
				Terjadinya polarisasi di masyarakat	Resiko Strategis	Perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu politik tertentu.	Stabilitas politik terganggu	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
						Rendahnya literasi politik dan literasi digital masyarakat	Meningkatnya konflik sosial	
						Pemerintah dan media yang tidak berpihak/netral	Terjadinya konflik horizontal di masyarakat	
						Narasi hoaks, narasi kebencian dan political buzzer	Rendahnya kepecayaan publik pada institusi pemerintah	

						Kurangnya konsolidasi dan koordinasi antar elemen pilar demokrasi dan kelompok strategis	Kerentanan kohesiantar civil society	
2	Risiko Strategis OPD	Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Harmoni Indonesia	Disintegrasi sosial	Resiko Strategis	Adanya ketimpangan sosial di masyarakat	Hubungan sosial antar kelompok masyarakat menjadi tidak harmonis	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
						Konflik SARA	Integrasi sosial menjadi terancam (perpecahan bangsa)	
						Rendahnya implementasi nilai-nilai Pancasila	Meningkatnya intoleransi Hilangnya nilai sosial didalam masyarakat Munculnya paham terorisme dan ekstremisme	
				Meningkatnya penyalagunaan narkoba	Resiko Strategis	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak buruk narkoba	Tingkat kejahatan dan penyakit sosial meningkat	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
							Rusaknya mental generasi muda	
						Lemahnya pengawasan terutama dari pemerintah		
						Beban masalah perekonomian yang semakin sulit		
				Terganggunya harmoni di masyarakat	Resiko Strategis	ketidaksetaraan sosial dan ekonomi	Munculnya konflik sosial	
						Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian	Intoleransi	

						kurangnya pemahaman terhadap keberagaman		
						Persaingan atas sumber daya alam	Menghambat pembangunan	
				Tindak pidana korupsi	Resiko fraud	Beberapa peraturan pemerintah yang mengatur pemberian hibah masih perlu diperjelas	Kerugian keuangan Negara.	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
						Dana hibah seringkali disalahgunakan untuk keperluan pribadi, kampanye politik, atau bahkan untuk kepentingan LSM fikti	Merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan hibah	
						Kurangnya transparansi dalam proses pemberian hibah	kegagalan pelaksanaan kegiatan yang didanai hibah	

No	Jenis Konteks Resiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Resiko	Kategori Resiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	Risiko Strategis OPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Tidak tercapainya sasaran OPD	Resiko operasional	Kesalahan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan	Akuntabilitas OPD kepada masyarakat rendah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
						Kegagalan prosedur kerja (kebijakan, SOP dan pedoman) sebagai pengendalian resiko	Tidak tercapainya target kinerja OPD	
						Identifikasi Risiko yang Kurang Akurat atau Tidak Lengkap		

						Tidak memantau dan mengevaluasi rencana mitigasi secara teratur		
						Keterbatasan SDM dan pelatihan		
2	Risiko Strategis OPD	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Banyak keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan	Resiko Strategis	Kompetensi petugas kurang memadai	Akuntabilitas OPD kepada masyarakat rendah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
				Proses administrasi yang berbelit		Sarana dan prasarana kurang memadai		

ANALISIS RISIKO

Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
Unjuk rasa anarkis	5	5	**25**	Ada	1. Sinergitas antar stakeholder dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial 2. Rapat rutin Forkompinda 3. Peningkatan koordinasi dengan Tim Terpandu Pananganan Konflik dan Tim Kewaspadaan dini	Memadai	4	4	16
Polarisasi di masyarakat	5	5	**25**	Ada	1. Membangun literasi masyarakat dalam penggunaan media sosial 2. Pendidikan Politik kepada masyarakat 3. Upaya-upaya penguatan Indeks Demokrasi Indonesia	Memadai	4	4	16
Disintegrasi sosial	5	5	**25**	Ada	1. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan 2. Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme 3. Pembumian nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat 4. Sinergitas dengan instansi terkait seperti BNPT, BPIP, Kanwil Agama dan Ormas Keagamaan	Memadai	4	4	16
Terganggunya harmoni di masyarakat	5	5	**25**	Ada	1. Sinergitas antar stakeholder dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial 2. FGD yang melibakan tokoh-tokoh masyarakat dan Tokoh Agama 3. Membangun literasi masyarakat dalam penggunaan media sosial 4. Membentuk Jejaring Sindikasi Konten Positif 5. Memperkuat kerjasama dengan FKUB	Memadai	4	4	16

Meningkatnya penyalagunaan narkoba	5	5	**25**	Ada	1. Sosialisasi tentang Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2. Bekerjasama dengan Pemda Kab/Kota membangun Membangun Desa Sehat Tanpa Narkoba: Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) 3.Membuat konten-konten dan sosialisasi bahaya narkoba 4. Meningatkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba	Memadai	4	4	16
Tindak pidana korupsi	3	5	**15**	Ada	1. Sosialisasi, Verifikasi dan Monitoring pemberian hibah 2. Penggunaan aplikasi untuk meminimalkan terjadinya proses kecurangan 3. Mekanisme proses pengaduan yang efektif	Memadai	2	5	10

Pernyataan Risiko	**Skor/Nilai Risiko yang Melekat**			**Pengendalian yang Ada**			**Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian**		
	Skor Probabilitas	**Skor Dampak**	**Level Risiko**	**Ada / Belum Ada**	**Uraian**	**Memadai / Belum Memadai**	**Skor Probabilitas**	**Skor Dampak**	**Level Risiko**
Tidak tercapainya sasaran OPD	3	3	**9**	Ada	1. Diadakan pelatihan pengelolaan manajemen resiko 2. Diadakan rapat pengendalian 3. Komitmen pimpinan	Memadai	2	2	4
Banyak keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan	3	3	**9**	Ada	1. Kemudahan mekanisme pengajuan keluhan 2. Dukungan sarana dan prasarana 3. SOP pelayanan yang jelas 4. Peningkatan kinerja melalui peningkatan kemmpuan SDM	Memadai	2	2	4
Proses administrasi yang berbelit	3	3	**9**	Ada	1. SOP pada setiap pelayanan yang jelas 2. Diberlakukanya reward and punishment kepada setiap pegawai	Memadai	2	2	4

PENETAPAN RISIKO PRIORITAS

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Unjuk rasa anarkis	16	Kepala Badan	Kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.	Kondusivitas daerah terganggu
				Kesejangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	kerusakan Fasilitas umum
				Kinerja elit politik yang dinilai buruk oleh masyarakat	Terganggunya aktivitas ekonomi di wilayah yang terdampak
				Aparat keamanan menggunakan cara represif dibandingkan dialogis dan kultural dalam menghadapi tuntutan masyarakat	Meningkatnya konflik sosial
				Perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok masyarakat	
2	Polarisasi di masyarakat	16	Kepala Badan	Perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu politik tertentu.	Stabilitas politik terganggu
				Rendahnya literasi politik dan literasi digital masyarakat	Meningkatnya konflik sosial
				Pemerintah dan media yang tidak berpihak/netral	Terjadinya konflik horizontal di masyarakat
				Narasi hoaks, narasi kebencian dan political buzzer	Rendahnya kepecayaan publik pada institusi pemerintah
				Kurangnya konsolidasi dan koordinasi antar elemen pilar demokrasi dan kelompok strategis	Kerentanan kohesiantar civil society

3	Disintegrasi sosial	16	Kepala Badan	Adanya ketimpangan sosial di masyarakat	Hubungan sosial antar kelompok masyarakat menjadi tidak harmonis
				Konflik SARA	Integrasi sosial menjadi terancam (perpecahan bangsa)
				Rendahnya implementasi nilai-nilai Pancasila	Meningkatnya intoleransi
					Hilangnya nilai sosial didalam masyarakat
					Munculnya paham terorisme dan ekstremisme
4	Terganggunya harmoni	16	Kepala Badan	ketidaksetaraan sosial dan ekonomi	Munculnya konflik sosial
				Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian	Intoleransi
				kurangnya pemahaman terhadap keberagaman	Menghambat pembangunan
				Persaingan atas sumber daya alam	
5	Meningkatnya penyalagunaan narkoba	16	Kepala Badan	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak buruk narkoba	Tingkat kejahatan dan penyakit sosial meningkat
				Lemahnya pengawasan terutama dari pemerintah	Rusaknya mental generasi muda
				Beban masalah perekonomian yang semakin sulir	
6	Tindak pidana korupsi	10	Kepala Badan	Beberapa peraturan pemerintah yang mengatur pemberian hibah masih perlu diperjelas	Kerugian keuangan Negara.

				Dana hibah seringkali disalahgunakan untuk keperluan pribadi, kampanye politik, atau bahkan untuk kepentingan LSM fiktif	Merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan hibah
				Kurangnya transparansi dalam proses pemberian hibah	kegagalan pelaksanaan kegiatan yang didanai hibah

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak
Meningkatnya stablitas politik	Indeks Ketahanan Politik	Unjuk rasa anarkis	16	Kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat	Kondusivitas daerah terganggu
				Kesejangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	kerusakan Fasilitas umum
				Kinerja elit politik yang dinilai buruk oleh masyarakat	Terganggunya aktivitas ekonomi di wilayah yang terdampak
				Aparat keamanan menggunakan cara represif dibandingkan dialogis dan kultural dalam menghadapi tuntutan masyarakat	Meningkatnya konflik sosial
				Perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok masyarakat	
		Polarisasi	16	Perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu politik tertentu.	Stabilitas politik terganggu
				Rendahnya literasi politik dan literasi digital masyarakat	Meningkatnya konflik sosial
				Pemerintah dan media yang tidak berpihak/netral	Terjadinya konflik horizontal di masyarakat
				Narasi hoaks, narasi kebencian dan political buzzer	Rendahnya kepecayaan publik pada institusi pemerintah
				Kurangnya konsolidasi dan koordinasi antar elemen pilar demokrasi dan kelompok strategis	Kerentanan kohesiantar civil society

Meningkatnya ketahanan bangsa	Indeks Harmoni Indonesia	Disintegrasi sosial	16	Adanya ketimpangan sosial di masyarakat	Hubungan sosial antar kelompok masyarakat menjadi tidak harmonis
				Konflik SARA	Integrasi sosial menjadi terancam (perpecahan bangsa)
				Rendahnya implementasi nilai-nilai Pancasila	Meningkatnya intoleransi
					Hilangnya nilai sosial didalam masyarakat
					Munculnya paham terorisme dan ekstremisme
		Meningkatnya penyalagunaan narkoba	16	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak buruk narkoba	Tingkat kejahatan dan penyakit sosial meningkat
				Lemahnya pengawasan terutama dari pemerintah	Rusaknya mental generasi muda
				Beban masalah perekonomian yang semakin sulit	
		Terganggunya harmoni di masyarakat	16	ketidaksetaraan sosial dan ekonomi	Munculnya konflik sosial
				Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian	Intoleransi
				kurangnya pemahaman terhadap keberagaman	Menghambat pembangunan
				Persaingan atas sumber daya alam	
		Tindak pidana korupsi	10	Beberapa peraturan pemerintah yang mengatur pemberian hibah masih perlu diperjelas	Kerugian keuangan Negara.

				Dana hibah seringkali disalahgunakan untuk keperluan pribadi, kampanye politik, atau bahkan untuk kepentingan LSM fikti	Merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan hibah
				Kurangnya transparansi dalam proses pemberian hibah	kegagalan pelaksanaan kegiatan yang didanai hibah

RTP	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1. FGD yang melibakan tokoh-tokoh masyarakat dan Tokoh Agama	Kepala Badan	5 tahun
2. Pelatihan dan kerja sama bidang Intelijen		5 tahun
3. Rapat rutin Forkompinda		5 tahun
4. Dialog dengan mahasiswa dalam rangka menyerap aspirasi		5 tahun
1. Membentuk Jejaring Sindikasi Konten Positif	Kepala Badan	5 tahun
2. Pelatihan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan		5 tahun
3. Pelaksanaan kegiatan Jambore Harmoni Jawa Tengah		5 tahun

1. Penguatan kontra radikalisme dan ekstriminsme bagi masyarakat	Kepala Badan	5 tahun
2. Festival Ormas		5 tahun
3. Pembinaan dan penguatan ormas lintas etnis		5 tahun
1. Membentuk relawan dan satgas anti narkoba di Perguruan Tinggi	Kepala Badan	5 tahun
2 Pencegahan dan melawan narkoba melalui ketahanan budaya		5 tahun
1. Sarasehan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Kepala Badan	5 tahun
2. Membentuk forum penguatan moderasi beragama dan wasbang		5 tahun
1. Membuat petunjuk pelaksanaan penggunaan hibah dari hasil evaluasi setiap tahunnya	Kepala Badan	5 tahun

2. Penyempurnaan Penggunaan aplikasi untuk meminimalkan terjadinya proses kecurangan		5 tahun

BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka menengah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra PD Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renstra Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 merupakan dokumen periode 5 (lima) tahun, di dalamnya hanya memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Proses penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, Rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD.

Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2016, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Di dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Penghubung melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat, promosi dan informasi dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat, promosi dan informasi dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat, promosi dan informasi dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya maka diperlukan perencanaan awal yang matang dan terukur untuk itu Badan Penghubung menyusun Renstra Tahun 2025-2029 dengan merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 tentang Penyusunan Renstra, Perangkat Daerah melakukan Koordinasi Sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda dan Pemangku Kepentingan;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang mengamanahkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara bersama-sama dan serentak pada tahun 2024;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai acuan dalam mencapai visi dan misi, mengalokasikan sumber daya secara optimal serta mengukur dan mengevaluasi kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai panduan dan arahan dalam mengarahkan kinerja agar konsisten, terukur dan efektif dalam mencapai tujuan;
2. Sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan;
3. Sebagai acuan untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja Badan Penghubung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memaparkan Gambaran pelayanan Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Sumber Daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kinerja Pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra Periode Sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada tiga tahun mendatang.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang. Dalam bab ini juga dijabarkan rumusan strategi dan kebijakan Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta kinerja penyelenggaran bidang urusan dan dijelaskan secara rinci beserta anggaran lima tahun mendatang dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah; Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Badan Penghubung yang terdiri dari Kepala Badan, Subbagian Tata Usaha dan Subbidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat, Subbidang Promosi dan Informasi, Subbidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah, yang mempunyai Tugas dan Fungsi masing – masing sebagai berikut :

1. **Kepala Badan**

   Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang koordinasi dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

   Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Badan Penghubung melaksanakan fungsi sebagai berikut :

   a. Merumuskan kebijakan bidang pelayanan dan hubungan atar lembaga dan masyarakat, promosi dan informasi dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah
   b. Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan dan hubungan atar lembaga dan masyarakat, promosi dan informasi dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah
   c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan hubungan atar lembaga dan masyarakat, promosi dan informasi dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah
   d. Melaksanakan pembinaan administrasi dan kesekretariatan
   e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. **Subbag Tata Usaha**

   Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Subbagian Tata Usaha.

   Tugas tersebut meliputi :

   a. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;

b. Menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
c. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
d. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
f. Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan; dan
i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat

Subbidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat. Tugas sebagaimana dimaksud antara lain :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat;
c. Menyiapkan bahan pengelolaan pemberian dukungan tugas pemerintah daerah di Jakarta;
d. Menyiapkan bahan fasilitasi hubungan antar lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga lainnya serta masyarakat Jawa Tengah di Jakarta;
e. Menyiapkan bahan fasilitasi dan penyiapan kegiatan Gubernur dan para Kepala Perangkat Daerah dalam rangka kegiatan di Jakarta;
f. Menyiapkan bahan fasilitasi dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
g. Menyiapkan bahan penghubung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
h. Menyiapkan bahan penunjang kelancaran hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
i. Menyiapkan bahan mediator dan pelayanan administrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
j. Menyiapkan bahan meditasi masyarakat Jawa Tengah di Jakarta;
k. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat; dan
l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Subbidang Promosi dan Informasi

Subbidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang promosi dan informasi. Tugas dimaksud meliputi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi;
c. Menyiapkan bahan fasilitator investor ke Jawa Tengah;
d. Menyiapkan bahan fasilitasi promosi seni budaya di Jakarta;
e. Menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk unggulan atau potensi Jawa Tengah;
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan informasi; dan
g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Subbidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah

Subbidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis , pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah. Tugas tersebut meliputi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
c. Menyiapkan bahan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah Jawa Tengah;
d. Menyiapkan bahan sumber informasi bagi masyarakat umum maupun mancanegara tentang Jawa Tengah;
e. Menyiapkan bahan fasilitasi promosi dan Informasi Jawa Tengah;
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah; dan
g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah; berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan untuk dapat menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Kepala Subbagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang. Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Subbagian Tata Usaha
3. Subbidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat;
4. Subbidang Promosi dan Informasi;
5. Subbidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut pada gambar 1 :

Gambar 1.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH

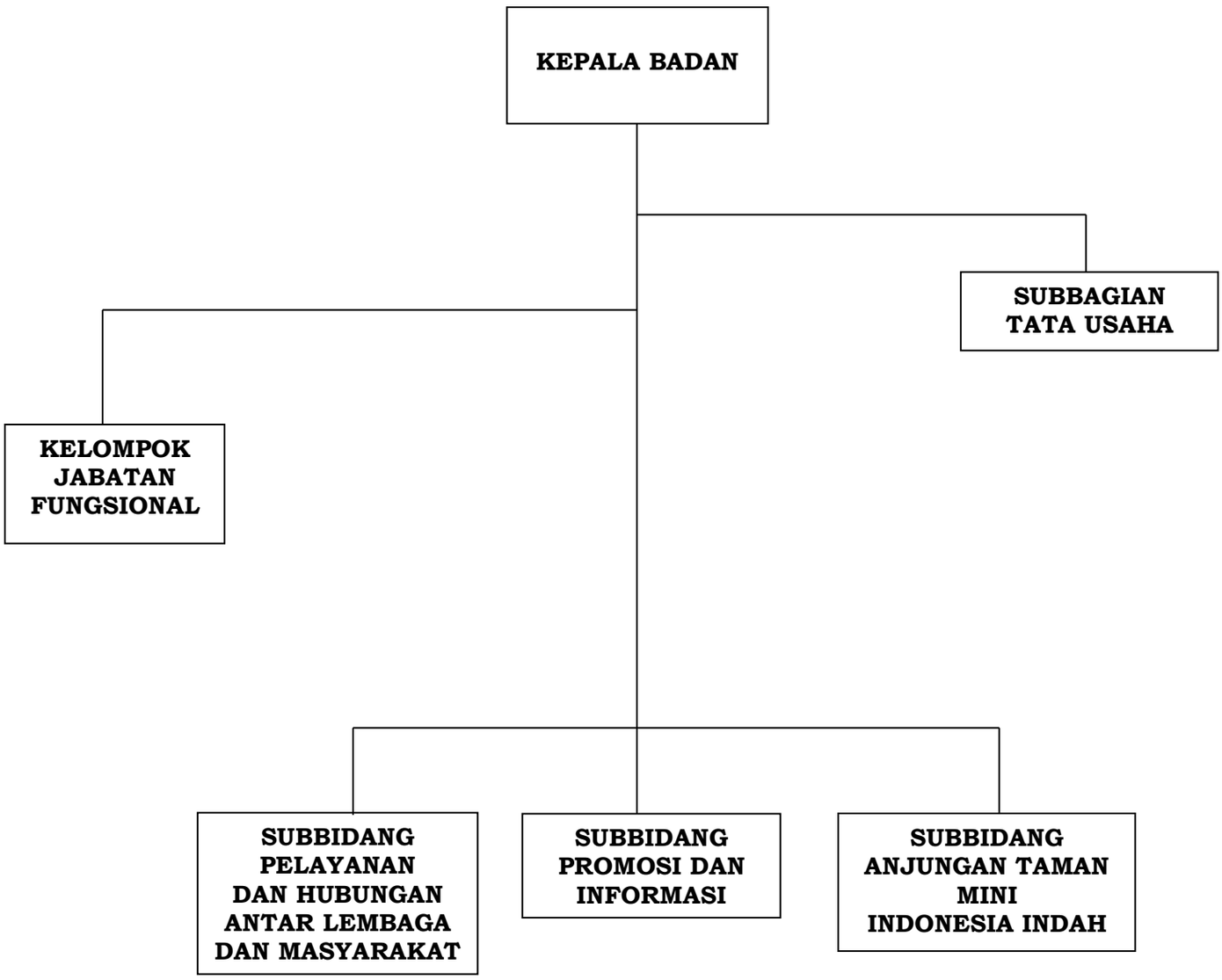

2.2 SUMBER DAYA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 99 Orang. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan golongan adalah sebagai berikut:

1. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1.

TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PER DESEMBER 2024
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PEGAWAI	PENDIDIKAN (ORANG)							TOTAL
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	(ORANG)
1	PNS	2	0	30	2	8	7	1	50
2	CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0
3	HARLEP	1	0	5	0	2	0	0	8
4	OUTSOURCING	0	0	35	1	5	0	0	41
Jumlah (Orang)		**3**	**0**	**70**	**3**	**15**	**7**	**1**	**99**
Persentase (%)		**3.03**	**0.00**	**70.71**	**3.03**	**15.15**	**7.07**	**1.01**	**100.00**

Berdasarkan tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah pada Badan Penghubung adalah SD sebesar 3.03% dan tingkat pendidikan tertinggi adalah Doktor (S3) sebesar 1.01%, sebagian besar pegawai Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah berpendidikan SMA sebesar 70.71% dan S1 sebesar 15.15%.

2. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis Kelamin, dapat dilihat dari Tabel 2.2.

TABEL 2.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PER DESEMBER 2024
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PEGAWAI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	(ORANG)
1	PNS	34	16	50
2	CPNS	0	0	0
3	HARLEP	5	3	8
4	OUTSOURCING	35	6	41
Jumlah (Orang)		**74**	**25**	**99**
Persentase (%)		**74.75**	**25.25**	**100.00**

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki–laki (74.75%) lebih banyak dibandingkan dengan perempuan (25.25%).

3. Pegawai Berdasarkan Golongan

Berdasarkan Golongan, Komposisi pegawai di Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat dari tabel 2.3.

TABEL 2.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
PER DESEMBER 2024
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PEGAWAI	GOLONGAN (ORANG)				TOTAL
		I	II	III	IV	(ORANG)
1	PNS	2	19	27	2	50
2	CPNS	0	0	0	0	0
3	HARLEP	0	0	0	0	0
4	OUTSOURCING	0	0	0	0	0
Jumlah (Orang)		**2**	**19**	**27**	**2**	**50**
Persentase (%)		**4.00**	**38.00**	**54.00**	**4.00**	**100.00**

Dari tabel 2.3, diperoleh gambaran bahwa pegawai dengan golongan III memiliki jumlah terbanyak di Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 54%.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi Wisma, Ruang dan Peralatan Kerja, Sarana Telekomunikasi dan Transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah Sarana dan Prasarana yang di miliki oleh Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
DATA ASET BADAN PENGHUBUNG PROV. JATENG TAHUN 2024

NO	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (RP)
1	**TANAH**	3	7,015,000,000
2	**Peralatan dan Mesin**		
	a. Alat Besar	17	430,760,400
	b. Alat Angkutan	42	13,310,787,484
	c. Alat Bengkel dan Alat ukur	6	9,650,000
	d. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,335	5,976,831,564
	e. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	186	1,675,327,657
	f. Alat Komputer	117	1,212,065,652
	g. Peralatan Olahraga	1	22,900,000
3	**Gedung dan Bangunan**		
	a. Bangunan Gedung	14	14,860,161,039
	b. Monumen	1	2,055,757,640
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**		
	a. Instalasi	65	45,661,478
5	**Aset Tetap Lainnya**		
	a. Barang Bersorak Kesenian/ Kebudayaan / Olahraga	500	2,864,681,150
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**		
JUMLAH		**2,287**	**49,479,584,064**

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah lima tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan Badan Penghubung**																			
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	-	-	-	82	83	84	85	-	83	83.06	85.25	85.75	-	101.22	100.07	101.49	100.88	-
2	**Sasaran Badan Penghubung**																			
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	-	-	-	82	83	84	85	-	82.25	83.06	85	86	-	100.30	100.07	101.19	101.18	-
	Nilai SAKIP Badan Penghubung	Angka	-	-	-	65	70	75	75	-	75.32	77.88	78.56	81.3	-	115.88	111.26	104.75	108.40	-
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%	-	-	-	-	-	84	85	-	-	-	86.50	85.5	-	-	-	102.97	100.59	-
3	**Program Badan Penghubung**																			
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung	%	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	%	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B	**Renstra PD Tahun 2024-2026**																			
1	Tujuan Badan Penghubung																			
	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	86	-	-	-	-	101.18
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	-	-	-	-	-	-	-	71.5					78.78	-	-	-	-	110.18
2	Sasaran Badan Penghubung					-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	86.25	-	-	-	-	101.47
	Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2.81	-	-	-	-	93.67
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	85.25	-	-	-	-	100.29
3	Program Badan Penghubung					-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.00
	Persentase Tingkat Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.00
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.00

Berdasarkan tabel d atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, terdapat 2 (dua) Sasaran Badan Penghubung yaitu dengna Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang mana Badan Penghubung dalam realisasinya mampu melebihi target yang telah ditentukan. Namun, sejak tahun 2022 terjadi penyesuaian nomenklatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keputusan ini, membawa implikasi pada perubahan pengelompokan sasaran dan tujuan strategis perangkat daerah.

Sejalan dengan terbitnya regulasi tersebut, Badan Penghubung melakukan penyesuaian terhadap sasaran strategis agar selaras dengan kebijakan nasional, indikator kinerja, dan kerangka kerja perencanaan pembangunan yang baru. Akibat perubahan ini, jumlah sasaran strategis dalam Renstra tahun 2022 meningkat menjadi tiga sasaran, sebagai bentuk penajaman arah pembangunan, peningkatan akuntabilitas, dan penyesuaian nomenklatur resmi pemerintah.

Ketercapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan baik dari target maupun realisasinya. Dapat dilihat pada tabel 2.5 bahwa Realisasi capaian kinerja dapat melebihi target yang telah ditentukan dalam Renstra 2018-2023. Adapun target capaian fisik kinerja Badan Penghubung sejak tahun 2020-2024 adalah 100%. Sedangkan realisasi capaian fisik kinerja juga 100%, sehingga dapat di jelaskan bahwa realisasi capaian sesuai dengan target. Hal ini dikarenakan adanya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai jadwal.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp 000)					APBD pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan	800,500,000	500,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	800,500,000	500,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	416,915,000	336,595,000	590,225,000	658,290,000	762,660,000	52.08	67.32	98.37	109.72	127.11	-4.4%	20.9%
2	Belanja	17,950,122,000	19,109,643,000	17,763,855,000	29,036,014,000	22,746,257,000	17,950,122,000	19,109,643,000	17,763,855,000	29,036,014,000	22,746,257,000	8,184,363,982	17,997,515,368	17,398,829,571	28,624,234,859	21,936,122,261	45.60	94.18	97.95	98.58	96.44	10.3%	39.4%
3	Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung berdasarkan *time series* 2020-2024 pada Tabel 2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya tinggi dicapai pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari kunjungan Tamu Wisma menurun sampai 50% dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2020 dikarenakan adanya kondisi Pandemi Covid-19 yang merupakan bencana Nasional dimana terdapat Surat Edaran dari Satgas Covid-19 yang melarang masyarakat untuk melakukan perjalanan ke luar kota maupun ke luar negeri. Pada tahun 2024 keadaan sudah kembali normal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari kunjungan Tamu Wisma mengalami kenaikan, apabila dibandingkan dengan target PAD 2024 maka rasio ketercapaiannya mencapai 127,11%.

Untuk Pagu Indikatif Belanja Daerah apabila dilihat dari tahun 2020 maka pagunya mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020, dengan Pagu Indikatif Rp 17.950.122.000,00 hanya terealisasi 45% yaitu Rp 8.184.363.982,00. Hal ini dikarenakan tahun 2020 merupakan kondisi awal dari Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lumpuhnya sebagian besar kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan *Refocusing* Anggaran terhadap semua OPD yang bertujuan untuk memprioritaskan anggaran untuk penanganan Covid-19. Setelah tiga tahun paska Covid-19, realisasi Anggaran tahun 2024 Rp. 21.936.122.261,00 apabila dibandingkan dengan pagu indikatifnya Rp. 22.746.257.000,00 maka rasio ketercapaiannya adalah 96,44%.

2.4 Permasalahan Pelayanan Badan Penghubung

Sumber daya Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan maksimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah merupakan *entry point* dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis yang valid tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun kedepan. Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah dapat dipetakan ke dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Penghubung
Provinsi Jawa Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Peningkatan Pelayanan Penghubung	Perlunya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Pejabat dan Masyarakat	1. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan pelayanan prima terhadap Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta.
		Perlunya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah	2. Sistem Teknologi dan Informasi yang masih perlu dikembangkan dalam pemanfaatan Aplikasi berbasis online sehingga memudahkan masyarakat Jawa Tengah memperoleh informasi.
2	Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Penghubung	Perlunya Peningkatan Kinerja di Badan Penghubung	3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM Badan Penghubung.

2.5 Isu Strategis Badan Penghubung

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam peningkatan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian atau masalah yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelayanan kepada masyarakat dan aparatur dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam hal pelayanan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun

mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal–hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Jawa Tengah Jangka Menengah. maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra PD Provinsi. Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Badan Penghubung dalam memberikan pelayanan publik.

Badan Penghubung menentukan permasalahan-permasalahan utama yang ada untuk diskoring dan kemudian ditentukan mana yang menjadi isu strategis seperti dalam Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
-	Perlunya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Pejabat dan Masyarakat	-	-	-	-	1. Masih perlunya peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada guna mengoptimalkan pelayanan 2. Kurang optimalnya dukungan dan pelayanan terhadap Masyarakat Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek
-	Perlunya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah	-	-	-	-	3. Masih perlunya peningkatan kegiatan Promosi Produk Unggulan dan Potensi Jawa Tengah
	Perlunya Peningkatan Kinerja di Badan Penghubung	-	-	-	-	4. Masih perlunya peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 5. Masih kurangnya ketersediaan, pemanfaatan, pengelolaan Teknologi dan Informasi yang ada

Berdasarkan tabel di atas, maka Badan Penghubung menentukan isu-isu strategis yaitu sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada guna mengoptimalkan pelayanan;
2. Kurang optimalnya dukungan dan pelayanan terhadap Masyarakat Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek;
3. Masih perlunya peningkatan kegiatan Promosi Produk Unggulan dan Potensi Jawa Tengah;
4. Masih perlunya peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
5. Masih kurangnya ketersediaan pemanfaatan, pengelolaan Teknologi dan Informasi yang ada.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung

Renstra 2025-2029 merupakan implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030 yaitu "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045". Sedangkan Misi yang diusung ada 8 (delapan) yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran, Badan Penghubung berpedoman pada Misi Jawa Tengah yang ke-8 (delapan) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas.

a. Tujuan Badan Penghubung

Badan Penghubung sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah. Badan Penghubung memiliki fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Namun demikian, meskipun sebagai fungsi penunjang, dalam Renstra 2025-2029 Badan Penghubung telah menetapkan 2 (dua) Tujuan yang merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh Badan Penghubung dalam satu periode tertentu. Tujuan Badan Penghubung dirumuskan secara spesifik dan realistis dan diharapkan mampu menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Adapun 2 (dua) Tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung;
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis.

Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Tujuan Badan Penghubung tersebut yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung;
2. Indeks Reformasi Birokrasi.

Sedangkan untuk target Indikator Kinerja Utama selama 5 (lima) tahun mendatang, Badan Penghubung merumuskan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Indikator Kinerja Utama & Target IKU

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	85	86	86.25	86.5	86.75	87
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71.6	71.7	72	72.5	73	73.5

b. Sasaran Badan Penghubung

Setelah menetapkan Tujuan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan Sasaran Badan Penghubung. Sasaran ini merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran harus memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Badan Penghubung atau kelompok sasaran yang dilayani dan profil pelayanan Badan Penghubung.

Adapun Sasaran yang telah dirumuskan oleh Badan Penghubung serta targetnya diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Tujuan 1:** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung		Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85	86	85	86	86.25	86.5	86.75	87	87
		Sasaran 1: Meningkatnya Pelayanan Publik Bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85	86.25	85	86	86.25	86.5	86.75	87	87
2	**Tujuan 2:** Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	-	78.78	71.6	71.7	72	72.5	73	73.5	73.5
		Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	85.25	85	85.1	85.2	85.3	85.4	85.5	85.5
		Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko di Badan Penghubung	Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	2.81	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rancangan program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dan target kinerja hasil (*outcome*) program yang terdapat dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas.

Dalam Renstra Perangkat Daerah, Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan Tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kriteria Arah Kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional;
2. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum;
4. Arah kebijakan disusun per sasaran dan dijabarkan per tahun.

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan, Badan Penghubung mensinergikan strategi dan sasaran secara lebih operasional sehingga dapat lebih memperjelas strategi dan Badan Penghubung mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini merupakan tabel pemetaan strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan oleh Badan Penghubung:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1:			
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung	Meningkatnya Pelayanan Publik BagiPejabat dan Masyarakat Jawa Tengah	Mengoptimalkan pelayanan Badan Penghubung utamanya yang berhubungan langsung dengan Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah di Jabodetabek.	1. Peningkatan fasilitasi pelayanan terhadap Pejabat dan masyarakat Jawa Tengah di Jakarta; 2. Peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya Jawa Tengah di Jakarta; 3. Pengembangan Anjungan Jateng di TMII; 4. Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/ organisasi serta usaha industri kecil dan menengah di Jabodetabek.
Tujuan 2:			
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Di Badan Penghubung	Mengoptimalkan Kinerja Badan Penghubung	1. Peningkatan evaluasi kinerja secara berkala.
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Mengoptimalkan kompetensi SDM, Sarana dan Prasarana serta Teknologi dan Informasi Badan Penghubung	1. Peningkatan Kompetensi Pegawai; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisma; 3. Penerapan SOP Pelayanan; 4. Pengembangan Teknologi dan Informasi secara maksimal

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Badan Penghubung

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan sarana prasarana yang diarahkan pada transformasi digital layanan dan data, penguatan kelembagaan serta SDM, dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Penguatan sistem digital yang sudah berjalan, memperluas cakupan pelayanan publik berbasis teknologi, serta meningkatkan kompetensi aparatur. Selain itu, dilakukan pengembangan sarana dan prasarana kerja yang modern, efisien, dan ramah lingkungan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan.	Pengembangan inovasi pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional, optimalisasi kerja sama lintas sektor, serta penguatan peran kelembagaan dalam memfasilitasi promosi potensi daerah di tingkat nasional maupun internasional.	Penguatan jejaring dengan pemangku kepentingan dan diaspora Jawa Tengah, penyelenggaraan layanan publik modern yang sesuai standar nasional, serta konsolidasi tata kelola kelembagaan yang semakin adaptif dan profesional.	Terwujudnya kemandirian layanan publik berbasis digital penuh, kelembagaan yang kuat dan berdaya saing, serta pelayanan masyarakat yang responsif, inovatif, dan berkelanjutan demi mendukung terwujudnya Jawa Tengah Maju dan Sejahtera.

3.3 Manajemen Risiko Strategis Badan Penghubung

Pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Kepala Bappeda, atau OPD yang menangani perencanaan selaku koordinator teknis.

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Sedangkan pengelolaan risiko operasioal OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya.

Hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) diperoleh hasil Rencana Tindak Pengendalian terhadap risiko strategis sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Menurun	16	- adanya keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan - keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pelayanan	- Reputasi Badan Penghubung menjadi buruk	Keterbukaan Informasi Publik: - Mempublikasikan keberhasilan dan dampak positif program Badan Penghubung melalui media sosial dan platform lainnya. - menyampaikan rencana dan capaian kepada masyarakat secara berkala.	Kepala Badan	2025 - 2029
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat	Kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah peminat mudik gratis	16	Keterbatasan sumber daya dan anggaran	pemudik yang tidak mendapatkan kuota kecewa karena tidak sesuai harapan dan dianggap tidak tepat sasaran	- Menerapkan sistem pendaftaran pemudik yang terstruktur dan transparan sehingga tepat sasaran - Berkolaborasi dengan Pemkab/kota, BUMN , BUMD dalam penyelenggaraan mudik lebaran gratis untuk mengoptimalkan jumlah armada	Kasubbid Pelayanan dan HAL	2025 - 2029
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyalahgunaan anggaran atau fasilitas pelayanan	12	- kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan program	- kerugian keuangan daerah - penurunan kepercayaan masyarakat	- Tingkatkan pengendalian dengan melaksanakan pengawasan secara berkala pada setiap program dan kegiatan. - Memberikan Sanksi Tegas terhadap pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. - Menerapkan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system).	Kepala Badan	2025 - 2029
Pelayanan Penghubung	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung	kegiatan yang telah di rancang tidak berjalan sesuai target	12	- tidak adanya komunikasi rutin dengan mitra - perjanjian kerjasama yang tidak terinci	Gagal menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan mitra strategis	- menyusun perjanjian Kerja Sama yang Jelas mencakup tanggung jawab, tujuan, dan hasil yang diharapkan. - Adakan pertemuan rutin dengan mitra untuk mengevaluasi kemajuan dan membahas kendala. - melakukan evaluasi terhadap kinerja kerja sama untuk menemukan solusi atas kendala yang muncul.	- Kasubbid pelayanan dan HAL - Kasubbid Promosi dan Informasi - Kasubbid Anjungan	2025 - 2029
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang tidak sesuai spesifikasi atau terjadi keterlambatan pengadaan	12	kesalahan dalam perencanaan kebutuhan barang	kegiatan operasional terganggu akibat keterlambatan pengadaan	- memastikan kebutuhan barang diidentifikasi dengan jelas dan rinci dalam tahap perencanaan. - memilih vendor yang terpercaya melalui proses seleksi ketat berdasarkan kinerja sebelumnya. Serta adakan kontrak dengan penalti jika terjadi keterlambatan.	Kasubbag TU	2025 - 2029
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	tidak semua kabupaten/kota berpartisipasi dalam promosi seni budaya dan produk unggulan	12	Minimnya anggaran atau dukungan logistik dari kabupaten/kota setempat	Pameran produk unggulan tidak dapat diselenggarakan	- Komunikasi dan Sosialisasi Aktif. Meningkatkan komunikasi dengan kabupaten/kota untuk menyampaikan manfaat program secara jelas. - mengadakan pertemuan atau sosialisasi untuk membangun komitmen bersama.	Kasubbid Promosi dan Informasi	2025 - 2029
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	gangguan teknis pada saat kegiatan berlangsung	12	peralatan seperti pencahayaan , suara atau display produk mengalami kerusakan	ketidaknyamanan bagi peserta dan pengunjung pameran	- Melakukan tindakan Melakukan pengecekan teknis semua peralatan seperti pencahayaan, suara, dan display produk sebelum acara dimulai. - Tim Teknis yang Siaga: Melibatkan tim teknis yang kompeten dan siaga selama kegiatan berlangsung untuk menangani masalah segera.	Kasubbid Promosi dan Informasi	2025 - 2029
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Manipulasi data terkait tingkat kepuasan masyarakat	12	tekanan untuk menunjukan kinerja yang baik	Laporan kinerja yang tidak akurat , menurunkan kredibilitas instansi	- Menggunakan Sistem Digital yang Transparan untuk pengumpulan dan analisis data yang meminimalkan manipulasi. - Mempublikasikan hasil survei secara terbuka kepada masyarakat di Website / media sosial Badan Penghubung untuk meningkatkan transparansi.	- Kasubbid pelayanan dan HAL - Kasubbid Promosi dan Informasi - Kasubbid Anjungan	2025 - 2029
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Ketidakpuasan peserta mudik terhadap layanan transportasi	12	Armada yang digunakan tidak memenuhi standart kenyamanan	penyelenggaraan mudik gratis dianggap tidak profesional	- Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi armada untuk memastikan kenyamanan dan keamanan peserta. - memastikan armada yang dikirim penyedia sesuai dengan kesepakatan dan spesifikasi '- Melakukan survei kepuasan setelah pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kekurangan dan meningkatkan layanan di masa depan.	Kasubbid Pelayanan dan HAL	2025 - 2029
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Kurangnya peserta atau pengunjung	12	Promosi kurang efektif, kurangnya minat masyarakat lokal terhadap kegiatan seni.	Penurunan keberhasilan acara dan rendahnya dampak promosi budaya.	- Peningkatan publikasi . Menggunaan media sosial, website, atau aplikasi untuk mempromosikan kegiatan anjungan Jateng secara lebih luas. - Distribusikan informasi melalui brosur, spanduk, atau media cetak di sekitar lokasi kegiatan.	Kasubbid Promosi dan Informasi	2025 - 2029

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam mendukung Tujuan dan Sasaran, Badan Penghubung pun telah merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta besaran Anggaran. Adapun hasil perumusan tersebut adalah sebagai berikut:

Program:

1. Pelayanan Penghubung;
2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Kegiatan:

1. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat;
2. Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya;
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;
6. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
8. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
11. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
12. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
16. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan;
18. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
20. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

21. Pengadaan Mebel;
22. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
23. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
25. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
26. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
28. Pemeliharaan Mebel;
29. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
30. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
31. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Badan Penghubung, maka diperlukan pula anggaran yang mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung. Pada tahun 2024, Badan Penghubung memperoleh Anggaran setelah Perubahan sebesar Rp 22.746.257.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 21.936.122.261,-. Sedangkan untuk tahun 2025, Badan Penghubung memperoleh anggaran murni sebesar Rp 27.017.575.000,-.

Dalam Renstra 2025-2029, Badan Penghubung telah merencanakan kebutuhan selama 5 (lima) tahun ke depan dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2025 Rp. 27.017.575.000,-
Tahun 2026 Rp. 25.742.612.000,-
Tahun 2027 Rp. 27.893.822.000,-
Tahun 2028 Rp. 29.527.224.000,-
Tahun 2029 Rp. 31.167.394.000,-
Tahun 2030 Rp. 39.247.744.000,-

Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung				Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85,25	85	7,925,635,000	86	3,931,030,500	86.25	4,167,885,100	86.5	4,236,486,400	86.75	4,248,552,889	87	5,398,648,544	87	5,398,648,544	Badan Penghubung	DKI Jakarta
	Sasaran 1: Meningkatnya Pelayanan Publik Bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85	85	7,925,635,000	86	3,931,030,500	86.25	4,167,885,100	86.5	4,236,486,400	86.75	4,248,552,889	87	5,398,648,544	87	5,398,648,544	Badan Penghubung	DKI Jakarta
			Program 1: Pelayanan Penghubung	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung	%	-	100	7,925,635,000	100	3,931,030,500	100	4,167,885,100	100	4,236,486,400	100	4,248,552,889	100	5,398,648,544	100	5,398,648,544	Badan Penghubung	DKI Jakarta
			Kegiatan: Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat	%	-	100	4,242,145,000	100	3,031,030,500	100	3,177,885,100	100	3,197,486,400	100	3,201,592,889	100	4,110,958,544	100	4,110,958,544	Sub Bidang Pelayanan dan HAL	DKI Jakarta
				Persentase Kabupaten/kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	%		100	3,283,490,000	100	750,000,000	100	825,000,000	100	857,500,000	100	857,310,000	100	1,068,075,000	100	1,068,075,000	Sub Bidang Promosi dan Informasi	DKI Jakarta
				Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pengunjung Anjungan Daerah Jawa Tengah	%	-	100	400,000,000	100	150,000,000	100	165,000,000	100	181,500,000	100	189,650,000	100	219,615,000	100	219,615,000	Sub Bidang Anjungan	DKI Jakarta

Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Penghubung				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka		71.6	22,564,476,000	71.7	21,811,581,500	72	23,725,936,900	72.5	25,290,737,600	73	26,918,841,111	73.5	33,849,095,456	73.5	33,849,095,456	Badan Penghubung	DKI Jakarta
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,50	85	22,489,202,000	85	21,641,394,500		23,538,995,200		25,085,365,730		26,693,196,054		33,601,149,893	85	33,601,149,893	Badan Penghubung	DKI Jakarta
			Program 2: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	-	100	22,489,202,000	100	21,641,394,500	100	23,538,995,200	100	25,085,365,730	100	26,693,196,054	100	33,601,149,893	100	33,601,149,893	Badan Penghubung	DKI Jakarta
			Kegiatan 1: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	-	12	9,121,651,000	12	11,052,506,000	12	12,157,756,600	12	13,373,532,260	12	14,710,885,486	12	16,181,973,835	12	16,181,973,835	Sub Bagian Tata Usaha	DKI Jakarta
			Kegiatan 2: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	-	1	276,170,000	1	307,787,000	1	334,165,700	1	352,582,270	1	404,340,497	1	444,774,547	1	444,774,547	Sub Bagian Tata Usaha	DKI Jakarta
			Kegiatan 3: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	-	100	22,175,000	100	145,000,000	100	159,500,000	100	175,450,000	100	182,995,000	100	212,294,500	100	212,294,500	Sub Bagian Tata Usaha	DKI Jakarta
			Kegiatan 4: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	-	100	1,405,440,000	100	1,938,757,500	100	2,063,016,700	100	2,187,318,370	100	2,288,350,207	100	2,604,484,820	100	2,604,484,820	Sub Bagian Tata Usaha	DKI Jakarta

			Kegiatan 5: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	-	198	4,545,335,000	9	587,000,000	7	795,700,000	8	800,270,000	5	631,297,000	8	5,125,921,110	37	5,125,921,110	Sub Bagian Tata Usaha	DKI Jakarta
			Kegiatan 6: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	-	12	5,238,837,000	12	5,551,900,000	12	5,786,259,800	12	5,855,260,200	12	6,061,786,220	12	6,266,664,842	12	6,266,664,842	Sub Bagian Tata Usaha	DKI Jakarta
			Kegiatan 7: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	-	4	1,879,594,000	64	2,058,444,000	66	2,242,596,400	64	2,340,952,630	64	2,413,541,644	65	2,765,036,239	65	2,765,036,239	Sub Bagian Tata Usaha	DKI Jakarta
	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko di Badan Penghubung			Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	3	75,274,000	3.1	170,187,000	3.2	186,941,700	3.3	205,371,870	3.4	225,645,057	3.5	247,945,563	3.5	247,945,563	Badan Penghubung	DKI Jakarta
			Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	-	100	75,274,000	100	170,187,000		186,941,700		205,371,870		225,645,057		247,945,563	100	247,945,563	Sub Bagian Tata Usaha	DKI Jakarta

Tabel 4.2
Sub Kegiatan Badan Penghubung dalam Mendukung Program Daerah
Tahun 2025-2029

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Pelayanan terhadap Pimpinan dalam hal ini Gubernurm Wakil Gubernur, Ketua DPRD Jawa Tengah dan Aparatur Sipil Provinsi Jawa Tengah	15 Laporan	Program: Pelayanan Penghubung Kegiatan: Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
		Pelayanan terhadap warga Jawa Tengah di Jabodetabek dengan mengadakan kegiatan Mudik Gratis Lebaran serta bekerjasama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta untuk membantu warga Jawa Tengah yang terlantar, sakit dan ODGJ untuk bisa dipulangkan ke daerah asal di Jawa Tengah		Program: Pelayanan Penghubung Kegiatan: Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
		Mengadakan Festival Pangan dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan dan UMKM Jawa Tengah, mengadakan Pentas Duta Seni Kab/Kota di Anjungan Jawa Tengah serta memfasilitasi pengunjung Anjungan dengan bazar-bazar makanan setiap Triwulan I-IV	3 Laporan	Program: Pelayanan Penghubung Kegiatan: Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Sub Kegiatan: Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
		Revitalisasi Wisma dan Rehab Gedung Anjungan Jawa Tengah di TMII	4 Unit	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Melakukan pengadaan kendaraan dinas operasional untuk meningkatkan pelayanan	3 Unit	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Mengadakan Sosialisasi-sosialisasi yang dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja Pegawai seperti Sosialisasi Disiplin Pegawai, Sosialisasi Etika Pegawai dan Reformasi Birokrasi	68 Orang	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Badan Penghubung memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang dalam mengukur keberhasilan Badan Penghubung dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Adapun Indikator Kinerja Utama yang dimiliki Badan Penghubung adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung dan Indeks Reformasi Birokrasi. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030 telah ditentukan oleh Badan Penghubung dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	*Baseline* Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	85.75	86	85	86	86.25	86.5	86.75	87	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	-	78.78	71.6	71.7	72	72.5	73	73.5	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2024, serta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD;
2. Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 melalui peningkatan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
3. Penyusunan Renstra PD dilakukan secara transparan, efektif, efisien, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil *(outcome),* serta berbasis risiko *(riskbased planning);*

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan oleh Badan Penghubung dapat tercapai dengan angka yang tinggi sehingga dapat menjadi motivasi agar kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik. Badan Penghubung juga memiliki rencana tindak lanjut ke depannya untuk meningkatkan pelayanan bagi Pimpinan dan warga Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek yaitu dengan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan, peningkatan pemanfaatan teknologi, evaluasi survey kepuasan masyarat serta peningkatan kompetensi Pegawai.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.

POHON KINERJA
BADAN PENGHUBUNG 2025-2029

Mengetahui
Kepala Badan Penghubung,

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGHUBUNG

Sarida, S.STP., M.Si
NIP. 19831005 200412 1 002

CASCADING BADAN PENGHUBUNG 2025-2029

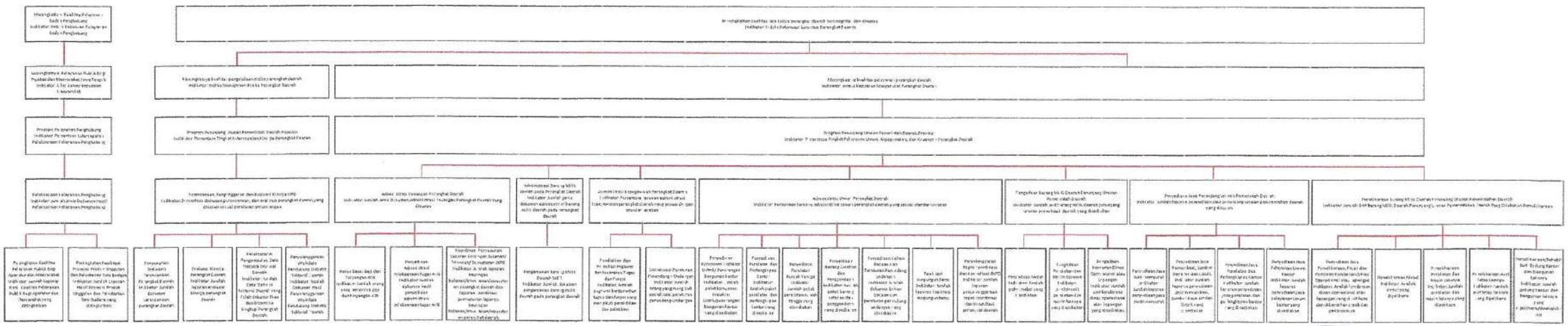

Mengetahui
Kepala Badan Penghubung

Sarjito, SSTP., M.Si
NIP. 19811005 200412 1 003

PEMERINTAH PROVINSI
BADAN PENGHUBUNG
JAWA TENGAH

Tabel
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Menurun	Risiko Reputasi	- adanya keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan - keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pelayanan	- Reputasi Badan Penghubung menjadi buruk	Kepala Daerah , masyarakat dan pemangku kepentingan
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyalahgunaan anggaran atau fasilitas pelayanan	Risiko Fraud	- kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan program	- kerugian keuangan daerah - penurunan kepercayaan masyarakat	Kepala Daerah dan Badan Penghubung
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko di Badan Penghubung	Indeks Manajemen Risiko	kurangnya pemahaman terhadap manajemen risiko	Risiko Operasional	- kurangnya pelatihan terkait pengelolaan risiko	- risiko tidak terkelola dengan baik sehingga menghambat terhadap pencapaian target strategis	Badan Penghubung
4	Sasaran Program	Pelayanan Penghubung	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung	kegiatan yang telah di rancang tidak berjalan sesuai target	Risiko Kemitraan	- tidak adanya komunikasi rutin dengan mitra - perjanjian kerjasama yang tidak terinci	Gagal menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan mitra strategis	Mitra kerjasama , masyarakat dan Badan Penghubung
5	Sasaran Program	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah	Risiko Operasional	- kurangnya koordinasi antar perangkat daerah - pelaksanaan kegiatan tidak berdasarkan dokumen perencanaan	penurunan citra dan kepercayaan terhadap pemerintah	Badan Penghubung
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Ketidaklancaran pelayanan kepegawaian dan keuangan di Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Risiko Operasional	Keterbatasan sumber daya	Adanya keluhan oleh pegawai dan pengguna layanan	pegawai Badan Penghubung
6	Sasaran Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Dokumen perencanaan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Risiko Operasional	- Kurangnya pemahanan terhadap regulasi terkini - waktu penyusunan dokumen yang tidak memadai	sanksi administratif	Badan Penghubung
7	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen keuangan tidak lengkap atau tidak sesuai standart	risiko operasional	- kurangnya pemahaman terhadap standart pelaporan keuangan - kesalahan dalam input data keuangan	- terjadinya audit dengan temuan pelanggaran - sanksi administratif tehadap Badan Penghubung	Kepala Badan penghubung dan tim pengelola keuangan Badan Penghubung
8	Sasaran Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Penunggakan premi asuransi barang milik daerah	Risiko Operasional	Kurang tertibnya administrasi	Tidak semua semua barang milik daerah dapat terpenuhi asuransi	Badan Penghubung
9	Sasaran Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	terlambatnya layanan administrasi kepegawaian	risiko operasional	- kurangnya SDM yang kompeten di bidang administrasi kepegawaian	keluhan dari pegawai terhadap pelayanan kepegawaian	pegawai Badan Penghubung
10	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	proses pelayanan administrasi umum tidak efisien atau terhambat	risiko operasional	- dokumen tidak dikelola secara sistematis	penundaan dalam pelaksanaan kegiatan	Badan Penghubung dan masyarakat pengguna layanan Badan penghubung

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang tidak sesuai spesifikasi atau terjadi keterlambatan pengadaan	Risiko Operasional	kesalahan dalam perencanaan kebutuhan barang	kegiatan operasional terganggu akibat keterlambatan pengadaan	Badan Penghubung
12	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	penyediaan jasa penunjang tidak sesuai spesifikasi atau terjadi keterlambatan	risiko operasional	kesalahan dalam perencanaan kebutuhan barang/jasa	kegiatan operasional terganggu akibat keterlambatan penyediaan jasa	Badan Penghubung
13	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	keterlambatan atau tidak optimalnya proses pemeliharaan barang milik daerah	risiko operasional	- kurangnya anggaran untuk pemeliharaan barang - tidak berpedoman pada RKO	- Kerusakan barang semakin parah, menyebabkan peningkatan biaya perbaikan - barang tidak dapat digunakan , menghambat pelayanan publik	Pengguna barang milik daerah di Badan penghubung
14	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	tidak semua kabupaten/kota berpartisipasi dalam promosi seni budaya dan produk unggulan	Risiko operasional	Minimnya anggaran atau dukungan logistik dari kabupaten/kota setempat	Pameran produk unggulan tidak dapat diselenggarakan	Badan Penghubung
				Tidak tercapainya target penjualan bagi pelaku UMKM	Risiko Operasional	Penempatan lokasi yang kurang strategis, kurangnya promosi, atau daya beli masyarakat rendah.	Tidak adanya peningkatan ekonomi bagi UMKM.	Peserta UMKM
				gangguan teknis pada saat kegiatan berlangsung	Risiko operasional	peralatan seperti pencahayaan , suara atau display produk mengalami kerusakan	ketidaknyamanan bagi peserta dan pengunjung pameran	Peserta dan pengunjung pameran
		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Manipulasi data terkait tingkat kepuasan masyarakat	Risiko Fraud	tekanan untuk menunjukan kinerja yang baik	Laporan kinerja yang tidak akurat , menurunkan kredibilitas instansi	Badan Penghubung
				Kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah peminat mudik gratis	Risiko Operasional	Keterbatasan sumber daya dan anggaran	pemudik yang tidak mendapatkan kuota kecewa karena tidak sesuai harapan dan dianggap tidak tepat sasaran	pemudik
				Ketidakpuasan peserta mudik terhadap layanan transportasi	Risiko reputasi	Armada yang digunakan tidak memenuhi standart kenyamanan	penyelenggaraan mudik gratis dianggap tidak profesional	pemudik dan Badan Penghubung
				Kendala Pengembalian warga binaan sosial (WBS) ke Daerah Asal	Risiko Operasional	- Hambatan administratif atau kurangnya dana untuk transportasi. - Keluarga WBS enggan menerima kembali anggota keluarga mereka yang telah selesai menjalani pembinaan karena berbagai faktor seperti faktor ekonomi , stigma sosial dan ketidakmampuan merawat.	- Warga binaan sosial berpotensi menjadi terlantar kembali karena tidak memiliki tempat tinggal atau dukungan keluarga. - Institusi sosial harus menanggung warga binaan lebih lama, yang dapat membebani kapasitas fasilitas dan anggaran.	masyarakat terlantar JATENG yang ada di Jakarta
			Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	gangguan teknis pada fasilitas di Anjungan Jawa Tengah	Risiko operasional	Infrastruktur tidak dirawat secara berkala	Pengunjung merasa tidak nyaman dan jumlah pengunjung menurun	Pengunjung dan Badan Penghubung
				Kurangnya peserta atau pengunjung	Risiko Operasional	Promosi kurang efektif, kurangnya minat masyarakat lokal terhadap kegiatan seni.	Penurunan keberhasilan acara dan rendahnya dampak promosi budaya.	Pengunjung, peserta dan Badan Penghubung
				Tidak tercapainya target penjualan bagi pelaku UMKM	Risiko Operasional	Penempatan lokasi yang kurang strategis, kurangnya promosi, atau daya beli masyarakat rendah.	Tidak adanya peningkatan ekonomi bagi UMKM.	Peserta UMKM

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala / Nilai Risiko Residu setelah adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tingkat Kepuasan Masyarakat Menurun	5	4	20	Ada	Keterbukaan Informasi Publik: - Mempublikasikan keberhasilan dan dampak positif program Badan Penghubung melalui media sosial dan platform lainnya. - menyampaikan rencana dan capaian kepada masyarakat secara berkala.	Belum Memadai	4	4	16
Penyalahgunaan anggaran atau fasilitas pelayanan	4	4	16	Ada	- Tingkatkan pengendalian dengan melaksanakan pengawasan secara berkala pada setiap program dan kegiatan. - Memberikan Sanksi Tegas terhadap pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. - Menerapkan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system).	Belum Memadai	3	4	12
kurangnya pemahaman terhadap manajemen risiko	3	4	12	Ada	- mengikuti pelatihan terkait manajemen risiko untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan staf. - membentuk Tim Risiko yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan memantau risiko. - melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi manajemen risiko di setiap program kegiatan .	Memadai	2	3	6
kegiatan yang telah di rancang tidak berjalan sesuai target	4	4	16	Ada	- menyusun perjanjian Kerja Sama yang Jelas mencakup tanggung jawab, tujuan, dan hasil yang diharapkan. - Adakan pertemuan rutin dengan mitra untuk mengevaluasi kemajuan dan membahas kendala. - melakukan evaluasi terhadap kinerja kerja sama untuk menemukan solusi atas kendala yang muncul.	Belum Memadai	3	4	12
tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah	3	4	12	Ada	- Memastikan setiap kegiatan mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dengan matang. - Melakukan monitoring berkala terhadap pencapaian target untuk mengidentifikasi potensi hambatan lebih awal.	Memadai	3	3	9
Ketidaklancaran pelayanan kepegawaian dan keuangan di Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	3	4	12	Ada	- Optimalisasi Sumber Daya. Menambahkan SDM dan melakukan pelatihan kepada staf untuk meningkatkan kompetensi. - Memperkuat komunikasi internal untuk menghindari miskomunikasi yang dapat menghambat pekerjaan.	Memadai	2	3	6
Dokumen perencanaan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	3	4	12	Ada	- Pimpinan melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan.	Memadai	2	3	6
Dokumen keuangan tidak lengkap atau tidak sesuai standart	4	4	16	Ada	- Menugaskan staf yang membidangi untuk mengikuti pelatihan terkait standar pelaporan keuangan dan tata cara pengisian dokumen. - Menerapkan sistem digital untuk mengelola data keuangan guna mengurangi kesalahan input.	Memadai	3	3	9
Penunggakan premi asuransi barang milik daerah	3	3	9	Ada	Meningkatkan Administrasi dan memastikan semua barang milik daerah terdaftar secara rapi dan terdokumentasi dengan baik.	Memadai	2	2	4
terlambatnya layanan administrasi kepegawaian	3	3	9	Ada	Standarisasi Proses dengan menyusun SOP yang jelas untuk setiap layanan administrasi kepegawaian.	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala / Nilai Risiko Residu setelah adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
proses pelayanan administrasi umum tidak efisien atau terhambat	3	3	9	Ada	Mengadakan rapat koordinasi secara rutin untuk menyelesaikan kendala operasional administrasi umum.	Memadai	2	2	4
Barang tidak sesuai spesifikasi atau terjadi keterlambatan pengadaan	4	4	16	Ada	- memastikan kebutuhan barang diidentifikasi dengan jelas dan rinci dalam tahap perencanaan. - memilih vendor yang terpercaya melalui proses seleksi ketat berdasarkan kinerja sebelumnya. Serta adakan kontrak dengan penalti jika terjadi keterlambatan.	Belum Memadai	3	4	12
penyediaan jasa penunjang tidak sesuai spesifikasi atau terjadi keterlambatan	4	3	12	Ada	Koordinasi Intensif dengan menyelenggarakan rapat rutin untuk memantau perkembangan dan mencegah hambatan.	Memadai	3	3	9
keterlambatan atau tidak optimalnya proses pemeliharaan barang milik daerah	4	3	12	Ada	memastikan kegiatan pemeliharaan berjalan sesuai dengan rencana kerja dan operasional	Memadai	3	3	9
tidak semua kabupaten/kota berpartisipasi dalam promosi seni budaya dan produk unggulan	5	4	20	Ada	- Komunikasi dan Sosialisasi Aktif. Meningkatkan komunikasi dengan kabupaten/kota untuk menyampaikan manfaat program secara jelas. - mengadakan pertemuan atau sosialisasi untuk membangun komitmen bersama.	Belum Memadai	4	3	12
Tidak tercapainya target penjualan bagi pelaku UMKM	4	4	16	Ada	- Menentuan Lokasi Strategis : memilih lokasi kegiatan yang memiliki tingkat kunjungan tinggi, seperti pusat perbelanjaan atau area strategis lainnya. - Meningkatkan promosi melalui media sosial, komunitas lokal, dan pemasaran langsung. - Mengkombinasikan Kegiatan utama dengan tambahkan kegiatan pendukung seperti hiburan untuk menarik lebih banyak pengunjung.	Memadai	3	3	9
gangguan teknis pada saat kegiatan berlangsung	4	4	16	Ada	- Melakukan tindakan Melakukan pengecekan teknis semua peralatan seperti pencahayaan, suara, dan display produk sebelum acara dimulai. - Tim Teknis yang Siaga: Melibatkan tim teknis yang kompeten dan siaga selama kegiatan berlangsung untuk menangani masalah segera.	Belum Memadai	3	4	12
Manipulasi data terkait tingkat kepuasan masyarakat	4	4	16	Ada	- Menggunakan Sistem Digital yang Transparan untuk pengumpulan dan analisis data yang meminimalkan manipulasi. - Mempublikasikan hasil survei secara terbuka kepada masyarakat di Website / media sosial Badan Penghubung untuk meningkatkan transparansi.	Belum Memadai	3	4	12
Kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah peminat mudik gratis	4	5	20	Ada	- Menerapkan sistem pendaftaran pemudik yang terstruktur dan transparan sehingga tepat sasaran - Berkolaborasi dengan Pemkab/kota, BUMN , BUMD dalam penyelenggaraan mudik lebaran gratis untuk mengoptimalkan jumlah armada	Belum Memadai	4	4	16
Ketidakpuasan peserta mudik terhadap layanan transportasi	4	5	20	Ada	- Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi armada untuk memastikan kenyamanan dan keamanan peserta. - memastikan armada yang dikirim penyedia sesuai dengan kesepakatan dan spesifikasi '- Melakukan survei kepuasan setelah pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kekurangan dan meningkatkan layanan di masa depan.	Belum Memadai	3	4	12
Kendala Pengembalian warga binaan sosial (WBS) ke Daerah Asal	4	4	16	Ada	- Koordinasi dengan dinas sosial Kab /Kota setempat untuk menangani WBS agar ditempatkandi rumah singgah/ panti sosial daerah asal. - Optimalisasi Anggaran: Alokasikan dana yang lebih efisien untuk transportasi dan akomodasi dengan prioritas pada kasus mendesak.	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala / Nilai Risiko Residu setelah adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
gangguan teknis pada fasilitas di Anjungan Jawa Tengah	4	4	16	Ada	Perawatan Berkala. Melakukan pemeliharaan rutin pada semua fasilitas untuk memastikan kondisi selalu layak pakai.	Memadai	3	2	6
Kurangnya peserta atau pengunjung	4	4	16	Ada	- Peningkatan publikasi . Menggunaan media sosial, website, atau aplikasi untuk mempromosikan kegiatan anjungan Jateng secara lebih luas. - Distribusikan informasi melalui brosur, spanduk, atau media cetak di sekitar lokasi kegiatan.	Belum Memadai	3	4	12
Tidak tercapainya target penjualan bagi pelaku UMKM	4	4	16	Ada	Monitoring dan Evaluasi Promosi. Memantau efektivitas media promosi yang digunakan dan lakukan penyesuaian jika hasilnya belum optimal.	Memadai	3	3	9

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Tingkat Kepuasan Masyarakat Menurun	16	Kepala Badan	- adanya keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan - keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pelayanan	- Reputasi Badan Penghubung menjadi buruk
Kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah peminat mudik gratis	16	Kepala Badan	Keterbatasan sumber daya dan anggaran	pemudik yang tidak mendapatkan kuota kecewa karena tidak sesuai harapan dan dianggap tidak tepat sasaran
Penyalahgunaan anggaran atau fasilitas pelayanan	12	Kepala Badan	- kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan program	- kerugian keuangan daerah - penurunan kepercayaan masyarakat
kegiatan yang telah di rancang tidak berjalan sesuai target	12	Kepala Badan	- tidak adanya komunikasi rutin dengan mitra - perjanjian kerjasama yang tidak terinci	Gagal menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan mitra strategis
Barang tidak sesuai spesifikasi atau terjadi keterlambatan pengadaan	12	Kepala Badan	kesalahan dalam perencanaan kebutuhan barang	kegiatan operasional terganggu akibat keterlambatan pengadaan
tidak semua kabupaten/kota berpartisipasi dalam promosi seni budaya dan produk	12	Kepala Badan	Minimnya anggaran atau dukungan logistik dari kabupaten/kota	Pameran produk unggulan tidak dapat diselenggarakan
gangguan teknis pada saat kegiatan berlangsung	12	Kepala Badan	peralatan seperti pencahayaan , suara atau display produk mengalami kerusakan	ketidaknyamanan bagi peserta dan pengunjung pameran
Manipulasi data terkait tingkat kepuasan masyarakat	12	Kepala Badan	tekanan untuk menunjukan kinerja yang baik	Laporan kinerja yang tidak akurat , menurunkan kredibilitas instansi
Ketidakpuasan peserta mudik terhadap layanan transportasi	12	Kepala Badan	Keterbatasan sumber daya dan anggaran	penyelenggaraan mudik gratis dianggap tidak profesional
Kurangnya peserta atau pengunjung	12	Kepala Badan	Promosi kurang efektif, kurangnya minat masyarakat lokal terhadap kegiatan seni.	Penurunan keberhasilan acara dan rendahnya dampak promosi budaya.

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Menurun	16	- adanya keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan - keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pelayanan	- Reputasi Badan Penghubung menjadi buruk	Keterbukaan Informasi Publik: - Mempublikasikan keberhasilan dan dampak positif program Badan Penghubung melalui media sosial dan platform lainnya. - menyampaikan rencana dan capaian kepada masyarakat secara berkala.	Kepala Badan	2025 - 2029
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat	Kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah peminat mudik gratis	16	Keterbatasan sumber daya dan anggaran	pemudik yang tidak mendapatkan kuota kecewa karena tidak sesuai harapan dan dianggap tidak tepat sasaran	- Menerapkan sistem pendaftaran pemudik yang terstruktur dan transparan sehingga tepat sasaran - Berkolaborasi dengan Pemkab/kota, BUMN , BUMD dalam penyelenggaraan mudik lebaran gratis untuk mengoptimalkan jumlah armada	Kasubbid Pelayanan dan HAL	2025 - 2029
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyalahgunaan anggaran atau fasilitas pelayanan	12	- kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan program	- kerugian keuangan daerah - penurunan kepercayaan masyarakat	- Tingkatkan pengendalian dengan melaksanakan pengawasan secara berkala pada setiap program dan kegiatan. - Memberikan Sanksi Tegas terhadap pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. - Menerapkan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system).	Kepala Badan	2025 - 2029
Pelayanan Penghubung	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung	kegiatan yang telah di rancang tidak berjalan sesuai target	12	- tidak adanya komunikasi rutin dengan mitra - perjanjian kerjasama yang tidak terinci	Gagal menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan mitra strategis	- menyusun perjanjian Kerja Sama yang Jelas mencakup tanggung jawab, tujuan, dan hasil yang diharapkan. - Adakan pertemuan rutin dengan mitra untuk mengevaluasi kemajuan dan membahas kendala. - melakukan evaluasi terhadap kinerja kerja sama untuk menemukan solusi atas kendala yang muncul.	- Kasubbid pelayanan dan HAL - Kasubbid Promosi dan Informasi - Kasubbid Anjungan	2025 - 2029
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang tidak sesuai spesifikasi atau terjadi keterlambatan pengadaan	12	kesalahan dalam perencanaan kebutuhan barang	kegiatan operasional terganggu akibat keterlambatan pengadaan	- memastikan kebutuhan barang diidentifikasi dengan jelas dan rinci dalam tahap perencanaan. - memilih vendor yang terpercaya melalui proses seleksi ketat berdasarkan kinerja sebelumnya. Serta adakan kontrak dengan penalti jika terjadi keterlambatan.	Kasubbag TU	2025 - 2029
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	tidak semua kabupaten/kota berpartisipasi dalam promosi seni budaya dan produk unggulan	12	Minimnya anggaran atau dukungan logistik dari kabupaten/kota setempat	Pameran produk unggulan tidak dapat diselenggarakan	- Komunikasi dan Sosialisasi Aktif. Meningkatkan komunikasi dengan kabupaten/kota untuk menyampaikan manfaat program secara jelas. - mengadakan pertemuan atau sosialisasi untuk membangun komitmen bersama.	Kasubbid Promosi dan Informasi	2025 - 2029
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	gangguan teknis pada saat kegiatan berlangsung	12	peralatan seperti pencahayaan , suara atau display produk mengalami kerusakan	ketidaknyamanan bagi peserta dan pengunjung pameran	- Melakukan tindakan Melakukan pengecekan teknis semua peralatan seperti pencahayaan, suara, dan display produk sebelum acara dimulai. - Tim Teknis yang Siaga: Melibatkan tim teknis yang kompeten dan siaga selama kegiatan berlangsung untuk menangani masalah segera.	Kasubbid Promosi dan Informasi	2025 - 2029
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Manipulasi data terkait tingkat kepuasan masyarakat	12	tekanan untuk menunjukan kinerja yang baik	Laporan kinerja yang tidak akurat , menurunkan kredibilitas instansi	- Menggunakan Sistem Digital yang Transparan untuk pengumpulan dan analisis data yang meminimalkan manipulasi. - Mempublikasikan hasil survei secara terbuka kepada masyarakat di Website / media sosial Badan Penghubung untuk meningkatkan transparansi.	- Kasubbid pelayanan dan HAL - Kasubbid Promosi dan Informasi - Kasubbid Anjungan	2025 - 2029
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Ketidakpuasan peserta mudik terhadap layanan transportasi	12	Armada yang digunakan tidak memenuhi standart kenyamanan	penyelenggaraan mudik gratis dianggap tidak profesional	- Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi armada untuk memastikan kenyamanan dan keamanan peserta. - memastikan armada yang dikirim penyedia sesuai dengan kesepakatan dan spesifikasi '- Melakukan survei kepuasan setelah pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kekurangan dan meningkatkan layanan di masa depan.	Kasubbid Pelayanan dan HAL	2025 - 2029
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Kurangnya peserta atau pengunjung	12	Promosi kurang efektif, kurangnya minat masyarakat lokal terhadap kegiatan seni.	Penurunan keberhasilan acara dan rendahnya dampak promosi budaya.	- Peningkatan publikasi . Menggunaan media sosial, website, atau aplikasi untuk mempromosikan kegiatan anjungan Jateng secara lebih luas. - Distribusikan informasi melalui brosur, spanduk, atau media cetak di sekitar lokasi kegiatan.	Kasubbid Promosi dan Informasi	2025 - 2029

SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra ini disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengharuskan setiap daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Provinsi Jawa Tengah memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Kondisi geografis dan demografis yang kompleks menuntut adanya perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam penanggulangan bencana. Renstra BPBD 2025-2029 ini disusun untuk menjawab tantangan tersebut, dengan fokus pada peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan pascabencana.

Dokumen Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Dengan adanya Renstra yang jelas dan terarah, diharapkan BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Melalui penyusunan Renstra 2025-2029 ini, BPBD Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi berbagai potensi bencana, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2025 – 2045
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
16. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Permendagri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah

Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan strategis untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Jawa Tengah. Dengan adanya Renstra, diharapkan terdapat keselarasan antara program BPBD dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, sehingga upaya penanggulangan bencana dapat berjalan efektif dan efisien.

2. Tujuan
   a. Menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam perencanaan strategis BPBD secara sistematis, terukur, dan terarah;
   b. Memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah;
   c. Menyelaraskan program dan kegiatan BPBD dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan perangkat daerah lainnya;
   d. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
   e. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan BPBD selama periode 2025–2029.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi penting yang menjelaskan jenis pelayanan utama yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah kepada masyarakat. Permasalahan aktual yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, baik dari aspek kelembagaan, SDM, pendanaan, hingga infrastruktur. Isu

strategis yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan, baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini menjelaskan arah pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tujuan sebagai arah umum yang ingin dicapai. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan secara lebih terukur ke dalam sasaran, yang mencerminkan hasil spesifik dan terukur yang hendak dicapai dalam lima tahun. Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun strategi sebagai pendekatan atau cara yang akan ditempuh, serta arah kebijakan sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan berkelanjutan.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memuat penjabaran strategi dan arah kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama lima tahun. Setiap program dan kegiatan disusun secara sistematis dan logis untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dijelaskan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Indikator ini berfungsi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan perangkat daerah..

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok

   Sekretariat BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah (Peraturan Gubernur Jateng No. 101 Tahun 2008 Pasal 2).

2. Fungsi

   a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;

   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang bencana;

   c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota

   d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;

   e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD;

   f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah

   Struktur Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur Pelaksana terdiri Kepala, Bagian (Bagian Tata Usaha) dan 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, sedangkan unsur pengarah terdiri dari unsur masyarakat professional/ahli dan unsur pejabat pemerintah daerah (Gambar 1).

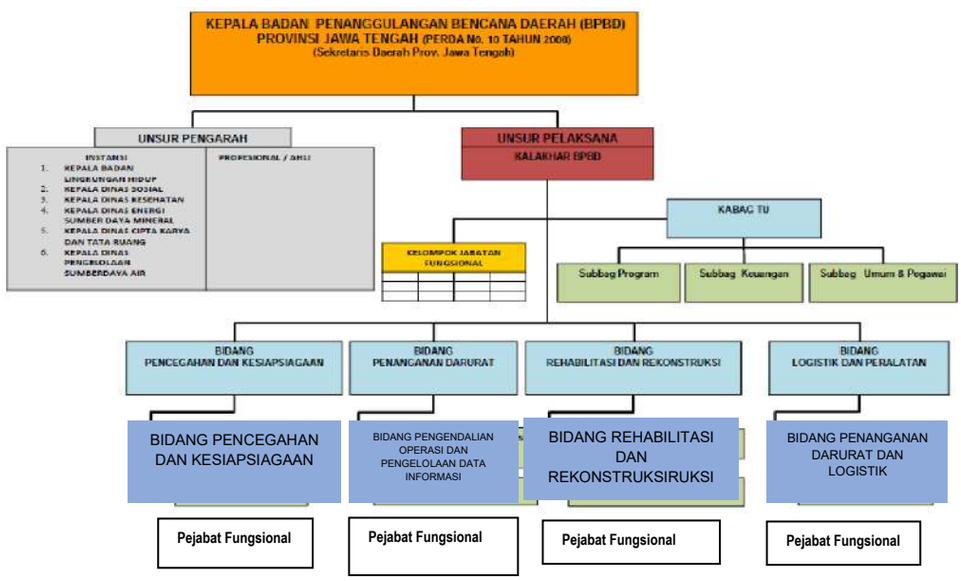

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 2 (dua) unsur pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil PNS. Jumlah pegawai dan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1
Pegawai BPBD Prov Jawa Tengah

No	Pegawai	Jumlah		Pendidikan Terakhir							
		L	P	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Total
1	PNS	31	7	13	8	2	0	9	4	1	37
2	PPPK	1			1						1
2	NON PNS	22	16	0	27	0	3	8	0	0	38
Total		**54**	**23**	**13**	**36**	**2**	**3**	**17**	**4**	**1**	**76**

Sumber: Data Pegawai BPBD Prov Jateng 2025

Sementara untuk sumberdaya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPBD Provinsi Jawa Tengah menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah

No	Pangkat/Gol	Jumlah	
1	2	3	
Golongan IV		**7**	Orang
a.	Pembina Utama madya (IV/d)	0	Orang
b.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	Orang
c.	Pembina Tk I (IV/b)	2	Orang
d.	Pembina (IV/a)	5	Orang
Golongan III		**18**	Orang
a.	Penata Tk I (III/d)	8	Orang
b.	Penata (III/c)	4	Orang
c.	Penata Muda Tk I (III/b)	4	Orang
d.	Penata Muda (III/a)	2	Orang
Golongan II		**10**	Orang
a.	Pengatur Tk I (II/d)	0	Orang
b.	Pengatur (II/c)	6	Orang
c.	Pengatur Muda (II/b)	3	Orang
d.	Pengatur Muda (II/a)	1	Orang
Golongan I		**1**	Orang
a.	Juru Tk I (I/d)	1	Orang
b.	Juru (I/c)	0	Orang
c.	Juru Muda Tk I (I/b)	0	Orang

No	Pangkat/Gol	Jumlah	
1	2	3	
d.	Juru Muda (I/a)	0	Orang
	TOTAL	**36**	**Orang**

2.2.2 Sarana dan Prasarana PB

Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik local, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Provinsi Jawa Tengah menggunakan sarana dan prasaran ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah (pemerintah kabupaten/kota) dalam menangani bencana.

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2025

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
I	01	Alat Transportasi		
		1	Mobil Ambulance	3
		2	Mobil Tangki BBM	
		3	Mobil Evakuasi	
		4	Mobil Pemadam Kebakaran	
		5	Helikopter	
		6	Mobil Komando	1
		7	Mobil Patroli	
		8	Mobil Jelajah	
		9	Mobil Operasional	13
		10	Mobil Komunikasi	1
		11	Mobil Rescue	8
		12	Motor Ops	14
		13	Motor Trail	12
		14	Mobil Jenazah	1
		15	Mobil Box	2
		16	Pick Up	2
		17	Mobil Logpal	1
		18	Truk Serbaguna	1
		19	Mobil Dapur Lapangan	1
		20	Truk Logistik	1
		21	Truk Tangki Air	5
		22	Truk Urinoir MCK	2
		23	Mobil Water Treatmen	1
		24	Truk bak terbuka	2
		25	Kapal Motor	
		26	Mini Bus	1
		27	Mobil Klik	
			Jumlah	67
II	02	Alat Komunikasi dan Informasi		
		1	Sistem Komunikasi Cepat	
		2	Portable Communication Mobile	
		3	HT	21
		4	RIG	6
		5	GPS	3
		6	Telepon Internet Satelit	
		7	Alat Deteksi Dini dan Perngatan Dini	
		8	SSB/RPP	3
		9	UHF	3
		10	Wireless	
		11	Megaphone	3
		12	Repiter / Antena	4
		13	Video Shooting	

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		14	Camera Digital	4
		15	Handycam	2
		16	Power Supply	2
			Jumlah	51
III	03	Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi		
		1	Alat Pemotong Baja dan Beton	5
		2	Rompi	
		3	Life Jacket/Rompi Pelampung	48
		4	Lifebouy	8
		5	Perahu Karet 12 org	
		6	Perahu Karet 10 org	14
		7	Perahu Karet 8 org	2
		8	Perahu Karet 6 org	1
		9	Masker Full Face	6
		10	Perahu Fiber	1 2
		11	Perahu Lipat + Mesin 18 PK	1
		12	Trailer	2
		13	Perahu Polyethilene + Mesin 9,8 PK	
		14	Mesin Perahu 40 PK	5
		15	Mesin Perahu 25 PK	5
		16	Mesin Perahu 18 PK	5
		17	Mesin Perahu 15 PK	1
		18	Dolphin / speed boat	2
		19	Peralatan Selam	7
		20	Vertical Rescue	6
		21	Teropong / Teleskop	4
		22	Chain Saw	6
		23	Helm SAR	4
		24	Pulay	10
		25	Breathing Appars	2
		26	Life Detector	
		27	Alat/Paket Pemadam Kebakaran	
		28	Pakaian Tahan Panas	2
		29	Pompa Perahu	14
		30	Rak Tempat Perahu Karet	5
		31	Selang BBM	14
		32	Sandaran Mesin Tempel	4
		33	Perahu Alumunium	
		34	Jangkar	
		35	Ring Buoy	
		36	Tali PP 10 mm	
		37	Tangki BBM	14
		38	Dayung	20
		39	Pakaian Tahan Api	
		40	Helm Tahan Panas	
		41	Sepatu	
		42	Sarung Tangan	
		43	Helm Biasa	
		44	Perahu Kayu	2
		45	Bidai Spinal	2
		46	Perahu Amphibi	1
			Jumlah	222
IV	04	Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar		
		1	WTP 250 lt	2
		2	WTP 500 lt	0
		3	WTP mini	2
		4	Dapur Lapangan/Umum	
		5	Fleksible Tank 2000 lt	2
		6	Fleksible Tank 1000 lt	2
		7	Toilet Lapangan	
		8	Tenda Posko	13
		9	Tenda Keluarga	100
		10	Tenda Regu	30
		11	Tenda Pleton	24
		12	Tenda Pengungsi	5

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		13	Tenda Sekolah	
		14	Tenda Lapangan	
		15	Tenda RS Lapangan	
		16	Tenda Individu	2
		17	Tenda Doom	
		18	Tandu Lipat	6
		19	Echosounder	2
		20	Velbed	125
		21	Tandon Air Plastik	
		22	Tandon Air Fiber Glas	1
		23	Tandu Spinal	
		24	Tenda Terpal Plastik	
		25	Jas Hujan	
		26	MCK Komunal	
			Jumlah	316
V	05	Alat Berat		
		1	Scope Loader	-
		2	Back Hoe	-
		3	Truck W Crane 3 Ton	-
		4	Tandem Vibration Roller 4 Ton	-
		5	Crane on Wheel 15 Ton	-
		6	Wheel Looder 1,2 - 1,5 M3	-
		7	Head Tractor & trailer	-
		8	Loader	-
		9	Exavator	-
		10	Dump Truck	-
		11	Grader	-
		12	Bulldoser	-
		13	Ponton	-
		14	Vibro Hammer	-
		15	Wheel Loader	-
		16	Ulhantor Roller	-
			Jumlah	-
VI	06	Alat Penerangan dan Kelistrikan		
		1	Senter	9
		2	Solar Sel Generator	
		3	Lampu Senter HID	2
		4	Lampu Srt Halogen	3
		5	Lampu Badai	
		6	Genset 5 KVA	2
		7	Genset 10 KVA	1
		8	Genset 1,2 KW	4
		9	Genset 1000 watt	6
		10	Solar Handle Lamp	60
		11	Lampu Penerangan (Solar Cell)	7
		12	Light Tower Port	2
		13	Lampu senter HID Seacrh Light	4
		14	Kabel	3
		15	Tiang Lampu Lapangan	
		16	Lampu Lapangan (Sport Light)	4
		17	Senter Besar	
		18	Lampu Rotator	
		19	Lampu Sorot	
		20	Emergency Lamp	6
			Jumlah	
VII	7	Alat Pergudangan		
		1	Froklift	2
		2	Hand Froklift	1
		3	Gerobak Sorong	-
		4	Trolley	2
		5	Rak Gondola	
		6	Palka	100
		7	Safety Equipment	
		8	Tenda Gudang	
		9	Water Closed	
		10	Tabung Gas 12 Kg	

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		11	Tabung Gas 3 Kg	
		12	Selang	
		13	Helm Kerja / PMK	
		14	Topi Proyek	
			Jumlah	105
VIII	8	Alat Lainnya		
		1	Pompa air	6
		2	Kawat Bronjong	
		3	Karung Plastik	-
		4	Garpu Sampah	-
		5	Dirgen 40 L	-
		6	Hand Sprayer	-
		7	Knock Down Closet	-
		8	Mesin Fogging	-
		9	Drag Bar	-
		10	Water furifier	-
		11	CCTV	-
		Jumlah		**6**
		Jumlah Total		**897**

Dukungan sarana dan prasarana yang dikelola BPBD Prov. Jawa Tengah digunakan untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh, dari pra bencana (pencegahan dan kesiapsiagaan), tanggap darurat, dan pasca bencana.

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

BPBD Prov Jawa Tengah telah melakukan berbagai dalam upaya pengurangan risiko bencana periode 2025 s.d tahun 2029 antara lain:

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

   Tujuan dan sasaran: Menurunkan Risiko Bencana dan Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain:

   a. Meningkatnya kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
      - Terlaksananya sosialisasi informasi rawan bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana
        - Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal;
        - Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota (IDENSOS);
      - Mengukur persentase penanganan pra bencana
        - Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana (DESTANA);
        - Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota (Gladi);
        - Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

yang sah dan legal;
- Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas;
- Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota (EWS);
- Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana.

2. Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi

Tujuan dan sasaran: Menurunkan Risiko Bencana dan Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain:

a. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dalam penanganan bencana
   - Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
     - Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;
     - Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi.
   - Meningkatnya kapasitas personil dalam pengolahan data dan informasi bencana
     - Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran: Menurunkan Risiko Bencana dan Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain:

a. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dalam pemulihan pasca bencana.
   - Meningkatnya kapasitas pemulihan pasca bencana kab/kota;
     - Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P);
     - Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P);
     - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
   - Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana
     - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi

4. Penanganan Darurat dan Logistik

Tujuan dan sasaran: Menurunkan Risiko Bencana dan Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain:

a. Meningkatnya kapasitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
   - Mengukur persentase penanganan tanggap darurat bencana
     - Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman;
     - Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi
   - Pelayanan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
     - Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel 4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan**																			
	Indeks ketahanan daerah dalam PB	**Angka**				**3,54**	**3,56**	**3,58**	**3,6**		**3.54**	**3,55**	**3,65**	**3,7**		**100**	**99,72**	**101,96**	**102,78**	
2	**Sasaran**																			
	Persentase penambahan kapasitas PB di wilayah Rawan bencana	%				10	10	10	10		10,71	7,29	10,35	13,36		107,1	72,9	103,5	**133,60**	
	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%				5	5	5	5		5,1	6,3	12,83	6,7		102	126	256,6	**134,00**	
	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	**100,00**	
	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	**100,00**	
3	**Program**																			
	Persentase penurunan risiko bencana	%				2	2	2	2		2	1	2	8		100	50	100	**400,00**	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase penanganan darurat kebencanaan	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	**100,00**	
	Persentase rehab rekon pasca bencana	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	**100,00**	
	Persentase pemenuhan logistik bencana	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	**100,00**	
1	**Tujuan**																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka				**78**	**80**	**85**	**85**		**82,34**	**82,66**	**86,67**	**92**		**105,56**	**103,33**	**101,96**	**108,24**	
2	**Sasaran**																			
	Nilai kepuasan masyarakat	Angka				75	80	85	90		82,34	82,66	86,67	92		109,79	103,33	101,96	**102,22**	
	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	Angka				66	67	68	70		72,26	75	76,22	80,55		109,48	111,94	112,09	**115,07**	
3	**Program**																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	**100,00**	
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	**100,00**	
B	**Renstra PD Tahun 2024-2026**																			
1	**Tujuan**																			
	Indeks Ketahanan Daerah	Angka								0,74					0,75					**101,35**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	**Sasaran**																			
	Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%								4,47					4,47					**100,00**
	Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa	Angka								0,57					0,22					**38,60**
	Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi	%								100					100					**100,00**
3	**Program**																			
	Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitas	%								0,12					0,17					**141,67**
	Persentase penanganan darurat bencana	%								100					100					**100,00**
	Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	%								2					2					**100,00**
	Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	%								2,86					2,86					**100,00**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**Tujuan**																			
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka								77					77					**100,00**
2	**Sasaran**																			
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Angka								100					100					**100,00**
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Angka								100					100					**100,00**
3	**Program**																			
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%								100					100					**100,00**
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					**100,00**

Tabel 5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Prov Jawa Tengah

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan																						
2	Belanja	25.941.000	27.379.000	30.230.000	31.530.000	21.190.000	22.408.318	18.103.377	16.163.495	17.631.132	18.389.883	20.351.438	17.276.561	15.614.549	17.174.166	17.655.315	90,82	95,43	96,60	97,41	96,01	-6,90	-25,19
3	Pembiayaan																						

Pendanaan penanggulangan bencana dari tahun ke tahun cukup fluktuatif namun pendanaan sesuai dengan prioritas pendanaan daerah dan pada masa tahun RPJMD ini terdapat banyak dampak dari pandemi covid-19 sehingga anggaran banyak dialihkan pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak covid-19. Dari aspek rasio penyerapan anggaran rata-rata telah diatas 95% dengan realisasi terbaik pada tahun 2023 dan hanya pada tahun 2020 awal mula covid-19 yang memiliki rasio rata-rata kurang dari 95%.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah dari pokok masalah hingga akar masalah, antara lain:

Tabel 6
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Upaya Dalam Menurunkan Risiko Bencana	Lemahnya pemanfaatan kajian risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.	1. Data Kajian Risiko Bencana (KRB) tidak diperbarui secara berkala oleh sebagian daerah 2. Masih ada kabupaten/kota yang belum memiliki dokumen KRB yang lengkap 3. Ketidakterpaduan data spasial risiko dengan perencanaan sektoral lainnya
	Rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan komunitas lokal	1. Kegiatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan belum menjangkau seluruh lapisan Masyarakat 2. Tidak semua desa/kelurahan memiliki relawan tanggap bencana (Destana) 3. Kurangnya pelatihan dan simulasi rutin bagi warga 4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peringatan dini dan jalur evakuasi
	Lemahnya integrasi PRB ke dalam dokumen perencanaan dan RTRW	1. PRB Belum dianggap sebagai aspek wajib dalam penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah 2. Koordinasi lintas OPD dan sektor teknis Belum efektif 3. Masih Minimnya regulasi daerah yang mengatur kewajiban memasukkan risiko bencana dalam perencanaan
	Terbatasnya SDM dan anggaran yang mendukung pengurangan risiko bencana	1. Personel teknis kebencanaan di BPBD dan OPD terkait masih terbatas secara jumlah dan kompetensi 2. Belum ada pelatihan rutin berbasis kompetensi PRB bagi staf pemerintah 3. Alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan dan mitigasi masih kecil dibandingkan respons 4. Tidak ada mekanisme khusus untuk mengakses pendanaan alternatif (CSR, dana bantuan, dll)
	Sarana dan prasarana pendukung PRB belum tersedia secara merata	1. Sebagian wilayah belum memiliki fasilitas peringatan dini berbasis teknologi (sirine, sensor, CCTV, dsb) 2. Jalur evakuasi dan titik kumpul belum ditetapkan atau disosialisasikan di daerah rawan 3. Infrastruktur publik belum dirancang dengan standar ketahanan bencana (*disaster resilient infrastructure*)
	Partisipasi multipihak (masyarakat, swasta, dan akademisi) dalam PRB masih rendah	1. Forum PRB daerah belum terbentuk atau tidak aktif di sebagian besar kabupaten/kota 2. Kurangnya kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung program PRB 3. Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari perguruan tinggi 4. Tidak ada regulasi atau insentif yang mendorong keterlibatan pihak ketiga dalam PRB
	Sistem informasi kebencanaan belum terintegrasi secara menyeluruh lintas sektor dan wilayah.	1. Belum ada standar baku dalam pengelolaan dan pembaruan data kebencanaan antar kabupaten/kota. 2. Koordinasi antar perangkat daerah/instansi dalam berbagi data kebencanaan belum efektif.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pemanfaatan data kebencanaan dalam perencanaan pembangunan daerah masih terbatas.	1. Data kebencanaan belum sepenuhnya diarusutamakan dalam dokumen perencanaan pembangunan. 2. Rendahnya literasi data pada sebagian aparatur daerah. 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi analisis (big data, GIS, AI) dalam mendukung kebijakan.
	Aksesibilitas dan diseminasi data kebencanaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan belum merata.	1. Sistem informasi kebencanaan belum memiliki kanal publik yang mudah diakses. 2. Anggaran untuk pengembangan platform informasi masih terbatas. 3. Infrastruktur jaringan internet di wilayah rawan bencana belum merata.
	Kapasitas SDM pengelola data dan sistem informasi kebencanaan masih terbatas.	1. Jumlah tenaga teknis bidang data dan informasi kebencanaan masih minim. 2. Belum ada pelatihan rutin berbasis kompetensi teknologi informasi kebencanaan dan penanganan keadaan darurat.
	Kelembagaan penanggulangan bencana di kabupaten/kota belum seluruhnya kuat dan berfungsi optimal.	1. Belum semua kabupaten/kota memiliki BPBD dengan struktur, kewenangan, dan sumber daya yang memadai. 2. Keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung kegiatan penanganan bencana. 3. Regulasi dan SOP penanganan bencana belum lengkap atau belum diimplementasikan secara konsisten. 4. Belum maksimalnya Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
	Kapasitas SDM teknis kebencanaan di daerah masih terbatas baik jumlah maupun kompetensinya.	1. Pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM kebencanaan belum dilakukan secara rutin dan berjenjang. 2. Minimnya tenaga teknis terlatih dalam bidang logistik, peralatan, operasi penanganan darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi (JITUPSANA dan R3P). 3. Tingginya ketergantungan pada bantuan SDM dari pusat atau provinsi saat terjadi bencana.
	Sarana dan prasarana penanganan bencana di kabupaten/kota belum memadai dan merata.	1. Sarana prasarana pendukung (peralatan evakuasi, posko darurat, gudang logistik) belum tersedia di seluruh daerah. 2. Kondisi peralatan darurat banyak yang sudah usang atau tidak standar. 3. Infrastruktur pendukung penanganan bencana belum dirancang sesuai standar ketahanan bencana.
	Koordinasi dan sinergi antar kabupaten/kota serta lintas sektor dalam penanganan bencana belum efektif.	1. Mekanisme koordinasi antar daerah dan lintas sektor belum terbangun dengan baik. 2. Forum koordinasi penanganan bencana di daerah belum aktif. 3. Partisipasi masyarakat, relawan, dan dunia usaha dalam penanganan bencana masih rendah. 4. Sistem komunikasi dan informasi antar instansi saat darurat belum terintegrasi.

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merupakan tantangan dan potensi yang akan dihadapi oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan, yang perlu direspons melalui perencanaan strategis guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan memperhatikan:

- Permasalahan pelayanan perangkat daerah,
- Isu strategis lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional), dan
- Potensi kewenangan yang dimiliki perangkat daerah.

a. Permasalahan Perangkat Daerah

1) Belum optimalnya pengurangan risiko bencana di wilayah rawan;
2) Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3) Lemahnya pengarusutamaan PRB dalam dokumen perencanaan daerah;
4) Terbatasnya sistem peringatan dini dan infrastruktur evakuasi;
5) Minimnya keterlibatan dunia usaha, akademisi, dan komunitas dalam penanggulangan bencana.

b. Isu Strategis Lingkungan Dinamis

Isu lingkungan dinamis yang mempengaruhi pelaksanaan urusan kebencanaan meliputi:

1) Global:
   - Peningkatan intensitas dan frekuensi bencana akibat perubahan iklim;
   - Dorongan internasional terhadap ketahanan komunitas melalui Sendai Framework dan Sustainable Development Goals (SDGs).
2) Nasional:
   - Penetapan PRB sebagai prioritas nasional dalam RPJMN dan RKP;
   - Implementasi Perpres No. 87 Tahun 2020 tentang RAN PRB;
   - Penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagai target nasional.
3) Regional:
   - Tingginya indeks risiko bencana di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah;
   - Kesenjangan kapasitas PRB antarwilayah;
   - Belum optimalnya forum koordinasi lintas daerah dalam pengurangan risiko bencana.

c. Potensi Daerah dan Kewenangan Perangkat Daerah

- Melaksanakan mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana;
- Mendorong edukasi kebencanaan dan pengembangan Destana;
- Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan lintas sektor terkait PRB;
- Menyediakan sarana prasarana serta sistem peringatan dini;
- Mengembangkan jejaring kerjasama multipihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media).

Tabel 7
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kewenangan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon darurat bencana	Belum optimalnya pengurangan risiko bencana di daerah rawan	Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Perubahan iklim meningkatkan intensitas dan frekuensi bencana	PRB sebagai agenda prioritas nasional (RPJMN, RKP)	Tingginya IRBI di wilayah selatan, pegunungan, dan pesisir Jateng	Bagaimana mempercepat penurunan risiko bencana berbasis peta risiko (KRB) dan perencanaan lintas sektor
Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dan fasilitasi pembentukan Destana	Rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat	Keadilan sosial dan partisipasi masyarakat dalam ketahanan	Dorongan global untuk community resilience	Peningkatan peran masyarakat dalam manajemen risiko (Desa Tangguh, Sekolah Aman)	Jumlah desa tangguh masih sangat rendah dibanding desa rawan	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui Destana dan edukasi PRB lintas usia dan wilayah
Koordinasi dan integrasi lintas sektor dalam PRB	Lemahnya pengarusutamaan PRB dalam dokumen perencanaan	Tata kelola kelembagaan dan integrasi pembangunan berkelanjutan	Tren global reformasi kelembagaan PRB dan tata kelola risiko	Perpres 87/2020 tentang RAN PRB dan peta jalan PRB	Tidak sinkronnya kebijakan PRB antar OPD dan kab/kota	Penguatan kelembagaan dan koordinasi PRB lintas sektor dan wilayah
Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan	Terbatasnya sistem peringatan dini dan jalur evakuasi	Infrastruktur adaptif dan berbasis risiko	Seruan internasional untuk early warning system berbasis komunitas	Target sistem peringatan dini di seluruh wilayah rawan (Sendai Framework)	Kesenjangan akses sarpras PRB antar wilayah	Pengembangan dan penyebarluasan sarpras PRB yang inklusif dan berbasis teknologi lokal
Kemitraan dan kolaborasi multipihak	Minimnya keterlibatan dunia usaha dan akademisi dalam PRB	Kolaborasi pentahelix dan inovasi lokal	Global partnership for resilience and DRR	Agenda nasional sinergi PRB dengan sektor non-pemerintah	Lemahnya forum PRB di daerah	Penguatan forum PRB dan mekanisme kolaboratif lintas sektor dalam pengurangan risiko

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan belum optimalnya pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah, maka tujuan yang dirumuskan adalah menurunkan risiko bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) yang diharapkan pada masa akhir RPJMD 2025-2029, turun menjadi 89,05 pada tahun 2030. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, ditetapkan sasaran utama berupa meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam. Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merefleksikan kemampuan daerah dalam menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari bencana.

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dijabarkan dengan program penanggulangan bencana dan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana, dengan sasaran strategis dan indikatornya sebagai berikut:

1) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam (*Indeks Ketahanan Daerah (IKD));*

   a) Meningkatnya kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana (*Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana*);

   b) Meningkatkan kapasitas sistem informasi dan data kebencanaan (*Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam*);

   c) Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dalam pemulihan pasca bencana *(Persentase kab/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana);*

   d) Meningkatkan kapasitas kabupaten/kota dalam penanganan bencana *(Persentase kab/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana)*

Tujuan ini merupakan pernyataan aktif dan positif yang mencerminkan arah preferensi BPBD dalam lima tahun ke depan untuk mewujudkan daerah yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.

Dalam dokumen rancangan awal Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2008. BPBD Prov Jawa Tengah pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya

manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Prov Jawa Tengah maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Prov. Jawa Tengah harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Prov Jawa Tengah jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Jawa Tengah yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebancanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan system untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Identifikasi permasalahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Menurunkan Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Angka	0	99,61	96,18	94,75	93,33	91,9	90,48	89,05	89,05
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	0,81	0,81

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Meningkatkan kualitas tata Kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	0	74.02	74,08	74.5	74.5	74.75	74.75	75	75
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	92	91.75	92	91.75	92	92	92.25	92.25	92.25
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	0	2,685	3,13	2,735	2,785	2,835	2,885	2,935	2,935

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Tujuan dari perangkat daerah adalah *menurunkan risiko bencana*, yang dirumuskan melalui berbagai strategi untuk meningkatkan *kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam*.

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa **strategi utama** diterapkan, antara lain:

1. **Penguatan basis data dan pemanfaatan informasi risiko bencana dalam Pembangunan,** dengan mewajibkan pembaruan KRB secara berkala di seluruh kabupaten/kota, Integrasi data spasial risiko ke dalam RTRW dan RPJMD, Menyusun standar baku pengelolaan data kebencanaan, Meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam berbagi data, Pengembangan portal publik kebencanaan yang mudah diakses, Penyediaan informasi risiko yang inklusif bagi kelompok rentan.
2. **Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan komunitas lokal**, dengan Perluasan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana, Pelatihan rutin dan simulasi evakuasi kebencanaan, Penguatan edukasi publik tentang peringatan dini dan jalur evakuasi, Pengembangan media komunikasi risiko berbasis lokal.
3. **Mainstreaming PRB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,** dengan Menetapkan PRB sebagai aspek wajib dalam RPJMD, Renstra perangkat daerah, dan RTRW, Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas OPD, Mendorong lahirnya perda/pergub terkait mainstreaming PRB.
4. **Pengembangan kapasitas kelembagaan, SDM, dan pendanaan PRB**, melalui Pelatihan berbasis kompetensi PRB bagi aparatur dan relawan, Meningkatkan proporsi anggaran pencegahan dan mitigasi, Membuka akses pendanaan alternatif melalui CSR, dana bantuan, dan skema inovatif lainnya, Penguatan struktur dan kewenangan BPBD kabupaten/kota, Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana, Penyusunan dan implementasi regulasi serta SOP penanganan bencana, Pelatihan berjenjang bagi tenaga teknis kebencanaan (logistik, penanganan darurat, JITUPSANA, R3P), ketergantungan pada tenaga dari pusat/provinsi melalui kaderisasi lokal.
5. **Penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai dan merata** Penyediaan sistem peringatan dini berbasis teknologi, Penetapan dan sosialisasi jalur evakuasi dan titik kumpul, Mendorong pemenuhan fasilitas evakuasi, posko darurat, gudang logistic, Mendorong modernisasi peralatan darurat yang sudah usang.
6. **Penguatan kolaborasi multipihak dalam PRB dan penanganan bencana** dalam Mengaktifkan Forum PRB daerah, Memperluas kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR kebencanaan, Mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam riset dan inovasi PRB, Mendorong partisipasi masyarakat, relawan, dan dunia usaha dalam operasi penanganan darurat.
7. **Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas daerah serta lintas sektor** dengan Meningkatkan peran forum koordinasi daerah, sistem komunikasi dan informasi terpadu saat darurat, Mendorong partisipasi masyarakat, relawan, dan dunia usaha dalam operasi penanganan darurat.

Tabel 9

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam	Menguatkan pemanfaatan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah.	1. Mewajibkan pembaruan KRB secara berkala di seluruh kabupaten/kota. 2. Integrasi data spasial risiko ke dalam RTRW dan RPJMD.
		Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan komunitas lokal.	1. Perluasan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). 2. Pelatihan rutin dan simulasi evakuasi kebencanaan. 3. Penguatan edukasi publik tentang peringatan dini dan jalur evakuasi. 4. Pengembangan media komunikasi risiko berbasis lokal.
		Memperkuat integrasi PRB dalam dokumen perencanaan daerah.	1. Menetapkan PRB sebagai aspek wajib dalam RPJMD, Renstra perangkat daerah, dan RTRW. 2. Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas OPD. 3. Mendorong lahirnya perda/pergub terkait mainstreaming PRB.
		Mengembangkan SDM dan pendanaan PRB.	1. Pelatihan berbasis kompetensi PRB bagi aparatur dan relawan. 2. Meningkatkan proporsi anggaran pencegahan dan mitigasi. 3. Membuka akses pendanaan alternatif melalui CSR, dana bantuan, dan skema inovatif lainnya.
		Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PRB yang merata.	1. Penyediaan sistem peringatan dini berbasis teknologi. 2. Penetapan dan sosialisasi jalur evakuasi dan titik kumpul.
		Meningkatkan partisipasi multipihak.	1. Mengaktifkan Forum PRB daerah. 2. Memperluas kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR kebencanaan. 3. Mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam riset dan inovasi PRB.
		Membangun sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi.	1. Menyusun standar baku pengelolaan data kebencanaan. 2. Meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam berbagi data.
		Memperluas aksesibilitas dan diseminasi data kebencanaan.	1. Pengembangan portal publik kebencanaan yang mudah diakses. 2. Penyediaan informasi risiko yang inklusif bagi kelompok rentan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mengembangkan kapasitas SDM pengelola data kebencanaan.	1. Pelatihan rutin kompetensi IT dan manajemen data kebencanaan. 2. Penambahan tenaga teknis bidang data dan informasi.
		Memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana di kabupaten/kota.	1. Penguatan struktur dan kewenangan BPBD kabupaten/kota. 2. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sub-urusan bencana. 3. Penyusunan dan implementasi regulasi serta SOP penanganan bencana.
		Mengembangkan kapasitas SDM teknis kebencanaan di daerah.	1. Pelatihan berjenjang bagi tenaga teknis kebencanaan (logistik, Penanganan Darurat, JITUPSANA, R3P). 2. Pengurangan ketergantungan pada tenaga dari pusat/provinsi melalui kaderisasi lokal.
		Menyediakan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai.	1. Mendoromg Pemenuhan fasilitas evakuasi, posko darurat, gudang logistik. 2. Mendorong Modernisasi peralatan darurat yang sudah usang.
		Menguatkan koordinasi dan sinergi lintas daerah dan sektor.	1. Meningkatkan peran forum koordinasi daerah. 2. Penguatan sistem komunikasi dan informasi terpadu saat darurat. 3. Mendorong partisipasi masyarakat, relawan, dan dunia usaha dalam operasi penanganan darurat.

Tabel 10
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Identifikasi dan pemetaan risiko bencana secara menyeluruh di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	Peningkatan kapasitas SDM BPBD dan masyarakat melalui pelatihan teknis dan manajerial kebencanaan.	Penguatan kapasitas kelembagaan melalui penerapan sistem informasi kebencanaan, dan inovasi teknologi.	Monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap program peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan.	Konsolidasi dan pengembangan model penanggulangan bencana yang dapat direplikasi di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Pemutakhiran data dan baseline informasi KRB (Kajian Risiko Bencana).	Pengembangan kelembagaan dan penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk sektor swasta dan akademisi.	Simulasi dan gladi lapang terpadu untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana.	Integrasi PRB ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (APBD).	Penguatan kemitraan strategis multipihak, termasuk swasta, akademisi, dan masyarakat.

Penguatan dasar perencanaan kebencanaan melalui sosialisasi, forum diskusi, dan edukasi dasar PRB.	Sosialisasi dan edukasi kebencanaan berbasis komunitas.	Penguatan sarana dan prasarana peringatan dini bencana di tingkat lokal dan provinsi.	Identifikasi area perbaikan dan rekomendasi keberlanjutan program.	Integrasi hasil evaluasi ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJMD).

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko strategis dilakukan sebagai upaya sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan penurunan indeks risiko bencana. Dalam konteks ini, perangkat daerah mengarahkan fokus pada peningkatan kapasitas daerah, baik dari sisi kelembagaan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia.

Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko utama, seperti: keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas data risiko bencana, kurangnya koordinasi lintas sektor, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Risiko-risiko ini kemudian dianalisis berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya terhadap pencapaian sasaran.

Sebagai tindak lanjut, strategi mitigasi dikembangkan melalui:

- Penguatan sistem informasi risiko bencana yang akurat dan terintegrasi,
- Penyusunan regulasi pendukung yang mendorong integrasi pengurangan risiko bencana (PRB) dalam kebijakan pembangunan,
- Pengembangan kapasitas SDM perangkat daerah melalui pelatihan teknis,
- Kolaborasi multipihak dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,
- Optimalisasi sumber pendanaan, baik dari APBD maupun sumber non-APBD (CSR, hibah, donor).

Setiap risiko dipantau dan dikaji ulang secara berkala untuk menjamin efektivitas respons, serta mendukung pencapaian sasaran strategis dalam jangka menengah. Dengan manajemen risiko yang adaptif dan responsif, diharapkan indeks risiko bencana dapat ditekan secara signifikan seiring meningkatnya kapasitas daerah.

Tabel 11

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan PD: Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Kurangnya upaya mitigasi yang berkelanjutan	16	Keterbatasan kapasitas dan pengetahuan daerah dalam merancang dan melaksanakan mitigasi yang efektif	Memperbesar risiko dan dampak bencana	Meningkatkan upaya mitigasi bencana (melakukan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan seperti penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, pembuatan peta wilayah rawan bencana, pelatihan evakuasi, dan simulasi bencana)	Kalakhar	2025-2029
Sasaran PD: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kurangnya kesiapan daerah dalam menghadapi bencana	16	Minimnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor	Menurunkan ketahanan daerah	Melaksanakan koordinasi dan melakukan sosialisasi terkait penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan Kab/Kota (Sosialisasi dan Desk Penilai IKD)	Kalakhar	2025-2029
Tujuan PD: Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kurangnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	16	Kurangnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPBD	Kurangnya kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola organisasi	Meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (melaksanakan POK dan Laporan/Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB)	Kalakhar	2025-2029
Sasaran PD: Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Terhambatnya pencapaian tujuan organisasi	16	Kurangnya kemampuan dalam mengelola risiko	Tujuan organisasi tidak tercapai sesuai target	Dibentuk Tim Pengelolaan Risiko dengan SK Kalakhar, melaksanakan Rapat POK sebagai upaya pemantauan pengelolaan risiko	Kalakhar	2025-2029
Sasaran PD: Meningkatnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ketidakpuasan masyarakat dalam	16	Kurangnya kecepatan dan	Pelaksanaan pelayanan publik	Adanya Kebijakan dalam memberikan kemudahan akses	Kalakhar	2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
kualitas pelayanan perangkat daerah	Perangkat Daerah	mendapatkan pelayanan di bidang bencana dapat memberikan penilaian buruk untuk BPBD		ketepatan dalam memberikan pelayanan publik	dalam penanggulangan bencana dinilai tidak optimal	informasi dan akses pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana (SOP dan Laporan SKM)		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan yang tertuang dalam renstra 2025 – 2029 ini sudah tertuju sebagai pendukung sasaran dan tujuan yang akan tercapai. Dalam penentuan program kegiatan yang didalamnya sebagai pendukung tujuan OPD dengan meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) dengan tercapainya tujuan OPD untuk meningkatkan ketahanan daerah diharapkan dapat mengurangi indeks risiko bencana (IRB) sebagai salah satu indikator sasaran daerah. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel 12 dibawah ini:

Tabel 12
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatanm dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Menurunkan Risiko Bencana *												4.325.000.000		5.375.000.000		5.425.000.000		5.860.000.000		6.325.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Indeks Risiko Bencana *	Angka	99,61	96,18	94,75		93,33		91,9		90,48		89,05		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Meningkatnya kapasitas											4.325.000.000		5.375.000.000		5.425.000.000		5.860.000.000		6.325.000.000	Sekretariat Badan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	daerah dalam penanggulangan bencana alam **																				Penanggulangan Bencana Daerah	
							Indeks Ketahanan Daerah (IKD) **	Angka	0,75	0,76	0,77	4.325.000.000	0,78	5.375.000.000	0,79	5.425.000.000	0,8	5.860.000.000	0,81	6.325.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ***									2.025.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
						Meningkatnya kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana ***	%	N/A	3,45	6,3	2.025.000.000	9,6	2.500.000.000	13,4	2.500.000.000	17,2	2.700.000.000	20,6	2.700.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana								700.000.000		700.000.000		700.000.000		775.000.000		700.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Provinsi ****																	a Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
						Meningkatnya sosialisasi informasi rawan bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana ****	%	0,01	0,023	0,023	700.000.000	0,023	700.000.000	0,023	700.000.000	0,023	775.000.000	0,023	700.000.000	Pokja Pencegahan	
		1.05.03.1.01.00003			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi *****							0		0		0		75.000.000		0	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
						Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan *****	Dokumen	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	75.000.000	N/A	0	Pokja Pencegahan	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.1.01.0004			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)							700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	Sekretariat Badan Penanggulanga	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman) *****																n Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
						Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi	Orang	3000	3000	3000	700.000.000	3000	700.000.000	3000	700.000.000	3000	700.000.000	3000	700.000.000	Pokja Pencegahan	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota *****														
		1.05.03.1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana ****								1.325.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.925.000.000		2.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Kesiapsiagaan	
						Meningkatnya penanganan pra bencana di Kab/Kota	Persentase penanganan pra bencana ****	%	N/A	100	100	1.325.000.000	100	1.800.000.000	100	1.800.000.000	100	1.925.000.000	100	2.000.000.000	Pokja Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.02.0013			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana *****							200.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		350.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana *****	Kawasan	48	15	15	200.000.000	20	275.000.000	20	275.000.000	25	275.000.000	25	350.000.000	Pokja Kesiapsiagaan	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.05.03.1.02.0023			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
						Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota	Orang	1	1	200	75.000.000	200	75.000.000	200	75.000.000	200	75.000.000	200	75.000.000	Pokja Kesiapsiagaan	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten /Kota	yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana *****															dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.1.02.0024			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi *****							0		0		0		75.000.000		0	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					a Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
						Tersediany a dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan *****	Dokumen	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	75.000.000	N/A	0	Pokja Kesiapsiagaan	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.1.02.0025			Penyusunan Rencana Kontijensi *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		125.000.000	Sekretariat Badan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
						Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas *****	Dokumen	1	1	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	125.000.000	Pokja Kesiapsiagaan	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.05.03.1.02.0026			Pengelolaan Risiko Bencana *****							800.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
						Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani *****	Kegiatan	119	99	10	800.000.000	15	1.200.000.000	15	1.200.000.000	15	1.200.000.000	15	1.200.000.000	Pokja Kesiapsiagaan	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten /Kota																dan Kesiapsiagaan
		1.05.03.1.02.0030			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana *****	Orang	360	200	200	150.000.000	200	150.000.000	200	150.000.000	200	200.000.000	200	250.000.000	Pokja Kesiapsiagaan	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ***									275.000.000		300.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
						Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dalam pemulihan pasca bencana	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana ***	%	N/A	100	100	275.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Rekonstruksi	
		1.05.03.1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana ****								275.000.000		300.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
						Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana	Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana ****	Kegiatan	N/A	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Pokja Rehabilitasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.05.03.1.04.0009			Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
						Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersedia	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan	Laporan	N/A	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Pokja Rehabilitasi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						an APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan *****																Rekonstruksi
						Meningkatnya kapasitas pemulihan pasca	Persentase peningkatan kapasitas	%	N/A	20	20	225.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	275.000.000	20	300.000.000	Pokja Rekonstruksi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						bencana kab/kota	Kab/kota dalam pemulihan pasca bencana ****																
		1.05.03.1.04.0007			Penanganan Pasca Bencana Provinsi *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
						Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU	Dokumen	1	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	Pokja Rekonstruksi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun *****																Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		1.05.03.1.04.0013			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi *****							100.000.000		125.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Orang	N/A	35	35	100.000.000	35	125.000.000	35	125.000.000	35	150.000.000	35	175.000.000	Pokja Rekonstruksi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							Pascabencana (R3P) *****															
		1.05.03.1.04.0023			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaa	Kabupaten/Kota	1	1	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	Pokja Rekonstruksi	Sekretariat Badan Penanggulangan Benca

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten /Kota	n dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun *****															na Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ***									325.000.000		350.000.000		375.000.000		435.000.000		425.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pengen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					dalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi	
						Meningkatnya kapasitas sistem informasi dan data kebencanaan	Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam ***	%	N/A	90	90	325.000.000	92	350.000.000	94	375.000.000	96	435.000.000	100	425.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.05.03.1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ****								225.000.000		250.000.000		275.000.000		335.000.000		325.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi	
						Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani ****	%	N/A	100	100	225.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000	100	335.000.000	100	325.000.000	Pokja Pengendalian Operasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.05.03.1.03.0030			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana *****							125.000.000		150.000.000		175.000.000		235.000.000		225.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi	
						Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat	Laporan	35	35	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	235.000.000	1	225.000.000	Pokja Pengendalian Operasi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							Bencana *****															- Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi
		1.05.03.1.03.0031			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Informasi	
						Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana *****	Laporan	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Pokja Pengendalian Operasi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi
		1.05.03.1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulan								100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Sekretariat Badan Penanggulanga	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				gan Bencana ****																	n Bencana Daerah - Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi	
						Meningkatnya kapasitas personil dalam pengolahan data dan informasi bencana	Jumlah personil kab/kota yang di tingkatkan kapasitas pengolahan data dan informasi bencana ****	Orang	N/A	70	70	100.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	Pokja Pengelolaan Data dan Informasi	
		1.05.03.1.04.0022			Penyusunan, Pengelolaa							100.0		100.0		100.0		100.0		100.0	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					n dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan *****							00.000		00.000		00.000		00.000		00.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi	
						Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan	Dokumen	35	35	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	Pokja Pengelolaan Data dan Informasi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Penge

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Daerah (SIPD)	Daerah (SIPD) *****															ndalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA ***									1.700.000.000		2.225.000.000		2.250.000.000		2.400.000.000		2.850.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik	
						Meningkatkan kapasitas kabupaten/kota dalam	Persentase kabupaten/kota yang	%	2,85	100	100	1.700.000.000	100	2.225.000.000	100	2.250.000.000	100	2.400.000.000	100	2.850.000.000	Sekretariat Badan Penang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						penanganan bencana	mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana ***														gulangan Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik	
		1.05.03.1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ****								1.700.000.000		2.225.000.000		2.250.000.000		2.400.000.000		2.850.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana ****	%	N/A	100	100	200.000.000	100	225.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000	100	300.000.000	Pokja Kedaruratan	
		1.05.03.1.03.0025			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik	
						Terlaksananya Upaya untuk Menemukan,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian	Laporan	35	35	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	Pokja Kedaruratan	Sekretariat Badan Penanggulan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana *****															gan Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
		1.05.03.1.03.0026			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi *****							150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersediannya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis *****	Orang	200	N/A	200	150.000.000	200	175.000.000	200	200.000.000	200	225.000.000	200	250.000.000	Pokja Kedaruratan	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
						Meningkatnya Pelayanan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan logistik	%	N/A	100	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.125.000.000	100	2.550.000.000	Pokja Logistik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Korban Bencana	di wilayah rawan bencana ****															
		1.05.03.1.03.0028			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana *****							1.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.125.000.000		2.550.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik	
						Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelam	Orang	5329	5000	5000	1.500.000.000	6500	2.000.000.000	6500	2.000.000.000	6500	2.125.000.000	6500	2.550.000.000	Pokja Logistik	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							atan dan Evakuasi Korban Bencana *****															- Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana												14.518.518.000		14.567.466.000		14.716.890.000		14.483.309.000		15.035.475.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Daerah *																						
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah *	Angka	77	74,08	74,5		74,5		74,75		74,75		75		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Badan											260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Penanggulangan Bencana Daerah **																					
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah **	Angka	2,685	3,13	2,735	260.000.000	2,785	260.000.000	2,835	260.000.000	2,885	260.000.000	2,935	260.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah ***	%	100	100	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Meningkatnya kualitas	Persentase dokumen	%	100	100	100	260.0	100	260.0	100	260.0	100	260.0	100	260.0	BAGIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****					00.000		00.000		00.000		00.000		00.000	TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	5	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Benca

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																						na Daerah
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	5	5	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					a Daerah	
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	18	18	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terselenggaranya Walidata	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	BAGIAN	Sekretariat Badan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****														TATA USAHA	Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah **											14.258.518.000		14.307.466.000		14.456.890.000		14.223.309.000		14.775.475.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah **	Angka	91,75	92	91,75	14.258.518.000	92	14.307.466.000	92	14.456.890.000	92,25	14.223.309.000	92,25	14.775.475.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									14.258.518.000		14.307.466.000		14.456.890.000		14.223.309.000		14.775.475.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	%	100	100	100	14.258.518.000	100	14.307.466.000	100	14.456.890.000	100	14.223.309.000	100	14.775.475.000	Sekretariat Badan Penanggulangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						keuangan perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah ***														Bencana Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								7.850.000.000		7.850.000.000		7.950.000.000		8.050.000.000		8.350.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang	Dokumen	1	1	1	7.850.000.000	1	7.850.000.000	1	7.950.000.000	1	8.050.000.000	1	8.350.000.000	BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							disusun ****															
		X.XX.01.1.02.00001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							7.500.000.000		7.500.000.000		7.600.000.000		7.700.000.000		8.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/ Bulan	37	38	38	7.500.000.000	35	7.500.000.000	35	7.600.000.000	33	7.700.000.000	33	8.000.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.02.00002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Bencana Daerah	
						Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	1	1	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi barang	Jumlah jenis dokumen administrasi	Dokumen	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						milik daerah pada perangkat daerah	barang milik daerah pada perangkat daerah ****															
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepeg								15.000.000		19.966.000		20.000.000		15.000.000		15.000.000	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				awaian Perangkat Daerah ****																	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	15.000.000	100	19.966.000	100	20.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					a Daerah	
						Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	37	38	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							5.000.000		9.966.000		10.000.000		5.000.000		5.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasark	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	37	38	38	5.000.000	38	9.966.000	38	10.000.000	38	5.000.000	38	5.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Benca

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						an Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan *****															na Daerah
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	37	38	38	10.000.000	38	10.000.000	38	10.000.000	38	10.000.000	38	10.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perang								901.000.000		1.111.000.000		1.121.000.000		1.131.000.000		1.141.000.000	Sekretariat Badan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				kat Daerah ****																	Penanggulangan Bencana Daerah	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	901.000.000	100	1.111.000.000	100	1.121.000.000	100	1.131.000.000	100	1.141.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	2	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Benca

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							Disediakan *****															na Daerah
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	10	10	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					-Undangan *****																Bencana Daerah	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	2	4	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Kunjungan Tamu	n Tamu *****															ggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							800.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	800.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerinta							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Sekretariat Badan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					han Berbasis Elektronik pada SKPD *****																Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah								1.225.000.000		675.000.000		575.000.000		0		0	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Daerah ****																		
						Tersediany a barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerinta h daerah yang disediaka n ****	Unit	2	10	2	1.225. 000.0 00	2	675.0 00.00 0	2	575.0 00.00 0	N/ A	0	N/ A	0	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01 .1.07.00 01			Pengadaa n Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							0		0		0		0		0	Sekretar iat Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	
						Tersediany a Kendaraan Peroranga	Jumlah Unit Kendaraa n	Unit	N/A	N/A	N/ A	0	N/ A	0	N/ A	0	N/ A	0	N/ A	0	BAGIAN TATA USAHA	Sekret ariat Badan Penan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****																ggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							850.000.000		375.000.000		350.000.000		0		0	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	850.000.000	1	375.000.000	1	350.000.000	N/A	0	N/A	0	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	6	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersediany a Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediaka n *****	Unit	5	N/A	N/ A	0	N/ A	0	N/ A	0	N/ A	0	N/ A	0	BAGIAN TATA USAHA	Sekret ariat Badan Penan ggulan gan Benca na Daerah
		X.XX.01 .1.07.00 09			Pengadaa n Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							375.0 00.00 0		0		0		0		0	Sekretar iat Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	
						Tersediany a Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka n *****	Unit	1	1	1	375.0 00.00 0	N/ A	0	N/ A	0	N/ A	0	N/ A	0	BAGIAN TATA USAHA	Sekret ariat Badan Penan ggulan gan Benca na Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		300.000.000		225.000.000		0		0	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	3	N/A	0	1	300.000.000	6	225.000.000	N/A	0	N/A	0	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan								3.262.518.000		3.276.500.000		3.340.890.000		3.402.309.000		3.519.475.000	Sekretariat Badan Penanggulanga	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Pemerintahan Daerah ****																	n Bencana Daerah	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	3	3	3	3.262.518.000	3	3.276.500.000	3	3.340.890.000	3	3.402.309.000	3	3.519.475.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terlaksananya Penyediaa	Jumlah Laporan Penyedia	Laporan	1	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	BAGIAN	Sekretariat Badan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						n Jasa Surat Menyurat	an Jasa Surat Menyurat *****														TATA USAHA	Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							475.000.000		475.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	475.000.000	1	475.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							2.786.018.000		2.800.000.000		2.839.390.000		2.900.809.000		3.017.975.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	2.786.018.000	1	2.800.000.000	1	2.839.390.000	1	2.900.809.000	1	3.017.975.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeri								955.000.000		1.325.000.000		1.400.000.000		1.575.000.000		1.700.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				ntahan Daerah ****																	a Daerah	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	139	139	163	955.000.000	163	1.325.000.000	163	1.400.000.000	163	1.575.000.000	163	1.700.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau							650.000.000		700.000.000		750.000.000		775.000.000		800.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Lapangan *****																	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	56	56	61	650.000.000	61	700.000.000	61	750.000.000	61	775.000.000	61	800.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							75.000.000		100.000.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	5	5	5	75.000.000	5	100.000.000	5	75.000.000	5	100.000.000	5	150.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							155.000.000		450.000.000		500.000.000		600.000.000		600.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi *****	Unit	3	3	4	155.000.000	4	450.000.000	4	500.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	75	75	93	75.000.000	93	75.000.000	93	75.000.000	93	100.000.000	93	150.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 13
Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	1. Pemasangan *Early Warning System* (EWS) di wilayah rawan bencana 2. Monitoring sistem peringatan bencana 2. Gladi Kesiapsiagaan dan simulasi peringatan dini 3. Pemasangan rambu jalur evakuasi 4. Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	1. Tahun 2025 : 9 EWS dan 90 pemasangan rambu jalur evakuasi serta gladi EWS 2. Tahun 2026 : 10 EWS, dan 100 pemasangan rambu jalur evakuasi serta gladi EWS 3. Tahun 2027 : 15 EWS dan 150 pemasangan rambu jalur evakuasi serta gladi EWS 4. Tahun 2028 : 15 EWS dan 150 pemasangan rambu jalur evakuasi serta gladi EWS 5. Tahun 2029 : 15 EWS dan 150 pemasangan rambu jalur evakuasi serta gladi EWS, Penyusunan 1 dokumen kajian risiko bencana (KRB) 6. Tahun 2030 : 15 EWS dan 150 pemasangan rambu jalur evakuasi serta gladi EWS	- Program Penanggulangan Bencana - Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi - Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi - Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah → berperan dalam penyediaan jaringan komunikasi data dan sistem informasi untuk operasional EWS. 2. Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah → memiliki kewenangan pada pengelolaan infrastruktur dan wilayah rawan banjir/longsor. 3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah → mendukung pemasangan rambu jalur evakuasi dan akses transportasi darurat. 4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah → berperan pada pengawasan kawasan rawan geologi (gunung api, tanah longsor).

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
						5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah → mendukung pemantauan kondisi lingkungan dan mitigasi berbasis ekosistem.
2	Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	1. Pelatihan Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 2. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 3. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 4. Penguatan BPBD dalam penanganan bencana berbasis komunitas 5. Pembentukan Desa Tangguh Bencana	1. Tahun 2025 : 7 Komunitas/kelompok, 200 orang terlatih dalam penanganan darurat bencana, 1 laporan pelaksanaan respon cepat dalam 1 tahun, 1 dokumen Penguatan kelembagaan di Kabupaten/Kota, 15 kawasan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 2. Tahun 2026 : 7 Komunitas/kelompok, 200 orang terlatih dalam penanganan darurat bencana, 1 laporan pelaksanaan respon cepat dalam 1 tahun, Penguatan kelembagaan BPBD di 35 Kabupaten/Kota, 15 kawasan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 3. Tahun 2027 : 7 Komunitas/kelompok, 200 orang terlatih dalam penanganan darurat bencana, 1 laporan pelaksanaan respon cepat dalam 1 tahun, Penguatan kelembagaan BPBD di 35 Kabupaten/Kota, 20 kawasan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 4. Tahun 2028 : 7 Komunitas/kelompok, 200 orang terlatih dalam penanganan darurat bencana, 1 laporan pelaksanaan respon cepat dalam 1 tahun, Penguatan kelembagaan BPBD di 35 Kabupaten/Kota, 20 kawasan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 5. Tahun 2029 : 7 Komunitas/kelompok, 200 orang terlatih dalam penanganan darurat bencana, 1 laporan pelaksanaan respon cepat	- Program Penanggulangan Bencana - Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi - Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana - Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota - Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1. Bidang Pengendali Operasi dan pengelolaan data informasi 2. Bidang Penanganan darurat dan Logistik 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah → memiliki Tagana sebagai unsur utama dalam penanganan darurat sosial dan pengungsian. 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah (Dispermadesdukcapil) → berperan dalam pembinaan desa tangguh bencana dan kelembagaan masyarakat. 3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah → memastikan layanan kesehatan dalam situasi darurat bencana. 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah → memfasilitasi pelatihan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
			dalam 1 tahun, Penguatan kelembagaan BPBD di 35 Kabupaten/Kota, 25 kawasan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 6. Tahun 2030 : 7 Komunitas/kelompok, 200 orang terlatih dalam penanganan darurat bencana, 1 laporan pelaksanaan respon cepat dalam 1 tahun, Penguatan kelembagaan BPBD di 35 Kabupaten/Kota, 25 kawasan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana		dan sosialisasi kebencanaan di sekolah (SPAB). 5. Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah → membantu pemulihan infrastruktur dasar pasca-bencana.
3	Desa Maju dan Berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go Internasional, sistem informasi desa (SID) dan Tim Tanggap Bencana	1. Pembentukan Desa Tangguh Bencana	1. Tahun 2025 : 15 kawasan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 2. Tahun 2026 : 15 kawasan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 3. Tahun 2027 : 20 kawasan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 4. Tahun 2028 : 20 kawasan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 5. Tahun 2029 : 25 kawasan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 6. Tahun 2030 : 25 kawasan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	- Program Penanggulangan Bencana - Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah (Dispermadesdukcapil) → pembina utama pemberdayaan masyarakat dan penguatan desa tangguh bencana. 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah → mendukung pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) dan digitalisasi data kebencanaan. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah → membantu pemberdayaan ekonomi

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
						lokal melalui produk unggulan desa tangguh. 4. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah → mendukung ketahanan pangan melalui penguatan lumbung kesejahteraan desa.
4	Pendidikan perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren	1. Penguatan BPBD dalam penanganan bencana berbasis komunitas	1. Tahun 2025 : 7 komunitas/kelompok masyarakat (salah satunya untuk SPAB dengan sasaran SMA, SMK dan Pesantren) 2. Tahun 2026 : 7 komunitas/kelompok masyarakat (salah satunya untuk SPAB dengan sasaran SMA, SMK dan Pesantren 3. Tahun 2027 : 7 komunitas/kelompok masyarakat (salah satunya untuk SPAB dengan sasaran SMA, SMK dan Pesantren) 4. Tahun 2028 : 7 komunitas/kelompok masyarakat (salah satunya untuk SPAB dengan sasaran SMA, SMK dan Pesantren) 5. Tahun 2029 : 7 komunitas/kelompok masyarakat (salah satunya untuk SPAB dengan sasaran SMA, SMK dan Pesantren 6. Tahun 2030 : 7 komunitas/kelompok masyarakat (salah satunya untuk SPAB dengan sasaran SMA, SMK dan Pesantren)	- Program Penanggulangan Bencana - Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana - Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah → penanggung jawab utama pelaksanaan pendidikan formal termasuk SPAB di sekolah. 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah → memiliki program edukasi perubahan iklim dan lingkungan. 3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah → berkoordinasi dengan lembaga keagamaan dan pesantren dalam program sosial keagamaan. 4. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah →

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
						mendukung penyebarluasan informasi, kampanye, dan literasi kebencanaan digital.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD provinsi Jawa Tengah adalah Menurunkan Risiko Bencana (indeks risiko bencana - IRB) dan Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam (indeks ketahanan daerah - IKD). Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) terdapat pada 6 kegiatan pada 4 bidang urusan penanggulangan bencana, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunkan Risiko Bencana *Indeks Risiko Bencana*	109,01	99,61	96,18	94,75	93,33	91,9	90,48	89,05	
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*	0	77	74,08	74,5	74,5	74,75	74,75	75	
3	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam *Indeks Ketahanan Daerah (IKD)*	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	0,81	

Tabel 15
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Mengukur persentase penanganan pra bencana** **I**ndikator: *Persentase penanganan pra bencana*	0	0	100	100	100	100	100	100	
2.	**Mengukur persentase penanganan tanggap darurat bencana** Indikator: *Persentase penanganan tanggap darurat bencana*	0	0	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Dokumen rencana strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 2025–2029 disusun sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Dokumen ini dapat ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun dan/atau dalam kondisi lingkungan strategis tertentu. Kondisi strategis tersebut dapat berupa terjadinya bencana dalam skala besar, perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah 2025–2029, maupun adanya kebijakan nasional dan strategi baru yang memengaruhi pemanfaatan ruang provinsi serta dinamika internal di daerah.

Sebagai dokumen resmi, Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam rangka evaluasi serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun. Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah serta mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi bencana.

Pada bab ini disampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, langkah yang dapat ditempuh antara lain adalah melakukan prioritisasi kegiatan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, melakukan efisiensi pada pos-pos anggaran yang memungkinkan tanpa mengurangi kualitas hasil, serta mendorong optimalisasi kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk sinergi pendanaan maupun sumber daya lainnya.

Kaidah-kaidah pelaksanaan tetap harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, serta memperhatikan nilai-nilai partisipatif dan berkeadilan. Dengan demikian, walaupun terdapat keterbatasan anggaran, implementasi program dan kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, dan berorientasi pada hasil.

Rencana tindak lanjut dalam menghadapi dinamika tersebut antara lain adalah penyesuaian rencana kerja tahunan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka mobilisasi sumber daya, serta penyusunan langkah kontinjensi yang dapat diaktifkan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kondisi strategis yang memerlukan respons cepat. Selain itu, pemantauan dan evaluasi secara berkala perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra tetap dapat tercapai, sekalipun terdapat perubahan kapasitas pendanaan.

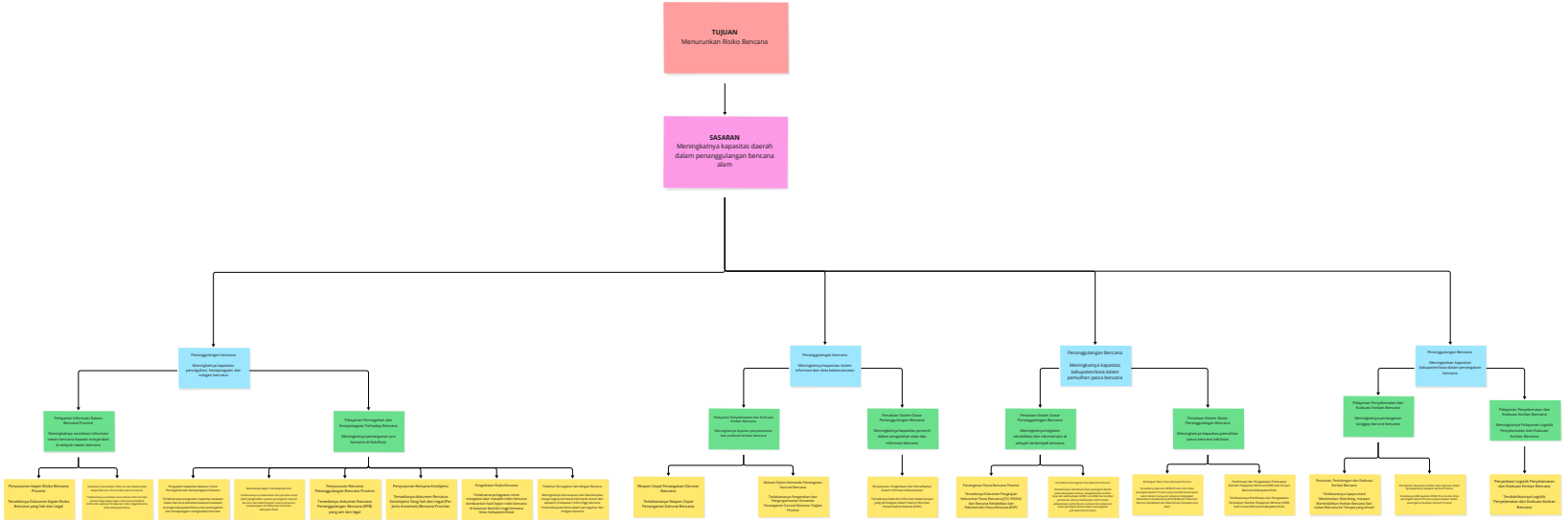
TUJUAN
Menurunkan Risiko Bencana
SASARAN
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam
Penanggulangan bencana
Meningkatnya kapasitas pengelolaan, kerjasama,peran dan mitigasi Bencana
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
Meningkatnya sosialisasi informasi rawan bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Up-to-date Legal
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal
Penyusunan Rencana Kontijensi
Tersedianya dokumen Rencana Kontijensi Yang Sah dan Legal (Per-Jenis Ancaman) Bencana Provinsi
Pengelolaan Risiko Bencana
Tersedianya kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan hasil kajian risiko bencana di tatanan terkecil (tingkat bencana desa, kelurahan/desa)
Penanggulangan bencana
Meningkatnya kapasitas sistem informasi dan data kebencanaan
Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kapasitas personil dalam pengelolaan data dan informasi bencana
Penyusunan Pengelolaan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Kebencanaan
Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dalam pemulihan pasca bencana
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana
Penyusunan Rencana Pasca Bencana Provinsi
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kapasitas pemulihan pasca bencana kab/kota
Penanggulangan Bencana
Meningkatkan kapasitas kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Meningkatnya Pelayanan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Tersedianya bisaknya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

TUJUAN RPJMD: Masyarakat Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

SASARAN RPJMD: Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan

TUJUAN OPD: Menurunkan Risiko Bencana

INDIKATOR: *Indeks Risiko Bencana*

SASARAN OPD: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam

INDIKATOR: *Indeks Ketahanan Daerah (IKD)*

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

PROGRAM OPD: Program Penanggulangan Bencana

SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

INDIKATOR: *Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana*

KEGIATAN OPD: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

- **SASARAN KEGIATAN:** Terlaksananya sosialisasi informasi rawan bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana
- **INDIKATOR:** *Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana*

SUB KEGIATAN OPD: *Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi*
- SASARAN SUB KEGIATAN: Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal
- INDIKATOR: *Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan*

SUB KEGIATAN OPD: *Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)*
- SASARAN SUB KEGIATAN: Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota
- INDIKATOR: *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota*

KEGIATAN OPD: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- **SASARAN KEGIATAN:** Meningkatnya penanganan pra bencana di Kab/Kota
- **INDIKATOR:** *Persentase penanganan pra bencana* **(IKK)**

SUB KEGIATAN OPD: *Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana*
- SASARAN SUB KEGIATAN: Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
- INDIKATOR: *Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*

SUB KEGIATAN OPD: *Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*
- SASARAN SUB KEGIATAN: Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota
- INDIKATOR: *Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi*

SUB KEGIATAN OPD: *Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi*
- SASARAN SUB KEGIATAN: Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal
- INDIKATOR: *Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan*

SUB KEGIATAN OPD: *Penyusunan Rencana Kontijensi*
- SASARAN SUB KEGIATAN: Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas
- INDIKATOR: *Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas*

SUB KEGIATAN OPD: *Pengelolaan Risiko Bencana*
- SASARAN SUB KEGIATAN: Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota
- INDIKATOR: *Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani*

SUB KEGIATAN OPD: *Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana*
- SASARAN SUB KEGIATAN: Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana
- INDIKATOR: *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana*

Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi

PROGRAM OPD: Program Penanggulangan Bencana

SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kapasitas sistem informasi dan data kebencanaaan

INDIKATOR: *Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam*

KEGIATAN OPD: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- **SASARAN KEGIATAN:** Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- **INDIKATOR:** *Persentase kejadian bencana yang tertangani*

SUB KEGIATAN OPD: *Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana*
- SASARAN SUB KEGIATAN: Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
- INDIKATOR: *Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana*

SUB KEGIATAN OPD: *Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana*
- SASARAN SUB KEGIATAN: Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi
- INDIKATOR: *Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana*

KEGIATAN OPD: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- **SASARAN KEGIATAN:** Meningkatnya kapasitas personil dalam pengolahan data dan informasi bencana
- **INDIKATOR:** *Jumlah personil kab/kota yang di tingkatkan kapasitas pengolahan data dan informasi bencana*

SUB KEGIATAN OPD: Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- SASARAN SUB KEGIATAN: Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
- INDIKATOR: Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

PROGRAM OPD: Program Penanggulangan Bencana

SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dalam pemulihan pasca bencana

INDIKATOR: *Persentase kab/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana*

KEGIATAN OPD: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- **SASARAN KEGIATAN:** Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana
- **INDIKATOR:** *Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana*

SUB KEGIATAN OPD: Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
- SASARAN SUB KEGIATAN: Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi
- INDIKATOR: Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi

KEGIATAN OPD: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- **SASARAN KEGIATAN:** Meningkatnya kapasitas pemulihan pasca bencana kab/kota
- **INDIKATOR:** *Persentase peningkatan kapasitas Kab/kota dalam pemulihan pasca bencana*

SUB KEGIATAN OPD: Penanganan Pasca Bencana Provinsi
- SASARAN SUB KEGIATAN: Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
- INDIKATOR: Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun

SUB KEGIATAN OPD: Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi
- SASARAN SUB KEGIATAN: Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
- INDIKATOR: Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Bidang Penanganan Darurat dan Logistik

PROGRAM OPD: Program Penanggulangan Bencana

SASARAN PROGRAM: Meningkatkan kapasitas kabupaten/kota dalam penanganan bencana

INDIKATOR: *Persentase kab/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana*

KEGIATAN OPD: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- **SASARAN KEGIATAN:** Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana
- **INDIKATOR:** *Persentase penanganan tanggap darurat bencana* **(IKK)**

SUB KEGIATAN OPD: Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
- SASARAN SUB KEGIATAN: Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman
- INDIKATOR: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

SUB KEGIATAN OPD: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat ProvinsiP
- SASARAN SUB KEGIATAN: Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi
- INDIKATOR: Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis

KEGIATAN OPD: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- **SASARAN KEGIATAN:** Pelayanan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- **INDIKATOR:** *Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan logistik di wilayah rawan bencana*

SUB KEGIATAN OPD: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- SASARAN SUB KEGIATAN: Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- INDIKATOR: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

3. Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Perencanaan yang berbasis risiko menjadi hal penting agar sejak awal perencanaan, perangkat daerah sudah dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang, dan sudah dilakukan upaya mitigasi sejak awal. Oleh karena itu dalam menyusun Renstra PD, manajemen risiko menjadi proses yang terintegrasi dan dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Renstra PD. Kertas kerja manajemen risiko harus dilampirkan dalam dokumen Renstra PD, terutama risiko strategis perangkat daerah. Proses manajamen risiko berdasarkan pada Pergub Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a. Identifikasi Risiko

Tabel Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Tujuan PD**	Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Kurangnya upaya mitigasi yang berkelanjutan	**Risiko Strategis**	Keterbatasan kapasitas dan pengetahuan daerah dalam merancang dan melaksanakan mitigasi yang efektif	Memperbesar risiko dan dampak bencana	Masyarakat, BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daera
2	**Sasaran PD**	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kurangnya kesiapan daerah dalam menghadapi bencana	**Risiko Strategis**	Minimnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor	Menurunkan ketahanan daerah	Masyarakat, BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daera
3	**Sasaran Program (Program Penanggulangan Bencana)**	Meningkatnya kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Meningkatnya dampak negatif bencana bagi kehidupan masyarakat	**Risiko Operasional**	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan untuk peningkatakan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Menurunkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Masyarakat, BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daera
4	**Sasaran Program (Program Penanggulangan Bencana)**	Meningkatnya kapasitas Kab/Kota dalam penanganan bencana	Persentase Kab/Kota yang mendapat pendampingan Provinsi dalam	Semakin meluasnya dampak bencana	**Risiko Reputasi**	Kurangnya kapasitas penanganan darurat bencana di tingkat pemerintah daerah dan	Menurunnya kemampuan pemerintah daerah dan relawan dalam merespon keadaan darurat	Masyarakat, BPBD Provinsi Jawa Tengah dan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			penanganan bencana			relawan		Pemerintah Daera
5	**Sasaran Program (Program Penanggulangan Bencana)**	Meningkatnya kapasitas Kab/Kota dalam pemulihan pasca bencana	Persentase Kab/Kota yg mendapat pendampingan Provinsi dalam pemulihan pasca bencana	Keterlambatan dalam penanganan pemulihan pasca bencana	**Risiko Operasional**	Kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam rencana pemulihan pasca bencana	Menurunnya kualitas kehidupan masyarakat pasca terdampak bencana	Masyarakat, BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daera
6	**Sasaran Program (Program Penanggulangan Bencana)**	Meningkatnya kapasitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Persentase Kab/Kota yang mengaktivasi klaster logistik	Legalisasi pembentukan klaster logistik tidak terealisasi karena kurangnya pemahaman Kepala Daerah akan pentingnya pembentukan klaster logistik	**Risiko Operasional**	Kurangnya koordinasi dan sosialisasi dengan Kab/Kota dalam merencanakan pembentukan klaster logistik	Kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana karena terhambatnya koordinasi kebutuhan logistik dengan Kab/Kota	Masyarakat, BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daera
7	**Tujuan PD**	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kurangnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	**Risiko Strategis**	Kurangnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Kurangnya kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola organisasi	BPBD Provinsi Jawa Tengah
8	**Sasaran PD**	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Terhambatnya pencapaian tujuan organisasi	**Risiko Strategis**	Kurangnya kemampuan dalam mengelola risiko	Tujuan organisasi tidak tercapai sesuai target	BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Masyarakat
9	**Sasaran Program (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)**	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja	**Risiko Operasional**	Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja	Kinerja organisasi kurang maksimal karena tidak dapat memenuhi/mencapai target kinerja yang direncanakan	BPBD Provinsi Jawa Tengah
10	**Sasaran PD**	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Ketidakpuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di bidang bencana dapat memberikan penilaian buruk untuk BPBD	**Risiko Reputasi**	Kurangnya kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan publik	Pelaksanaan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana dinilai tidak optimal	BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**Sasaran Program (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)**	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kurangnya koordinasi dan pemantauan antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	**Risiko Operasional**	Kurangnya pengawasan dan pengendalian internal	Meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan aset, laporan keuangan yang tidak akuntabel, dan kinerja organisasi tidak optimal	BPBD Provinsi Jawa Tengah

b. Analisis Risiko

Tabel Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurangnya upaya mitigasi yang berkelanjutan	4	5	20	Ada	Meningkatkan upaya mitigasi bencana	Belum Memadai	4	4	16
Kurangnya kesiapan daerah dalam menghadapi bencana	4	5	20	Ada	Melaksanakan koordinasi dan melakukan sosialisasi terkait peniliaian Indeks Ketahanan Daerah dengan Kab/Kota	Belum Memadai	4	4	16
Meningkatnya dampak negatif bencana bagi kehidupan masyarakat	4	4	16	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota dan tokoh masyarakat setempat agar partisipasi masyarakat banyak dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Belum Memadai	3	4	12
Semakin meluasnya dampak bencana	4	4	16	Ada	Meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana	Belum Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Keterlambatan dalam penanganan pemulihan pasca bencana	4	4	16	Ada	Meningkatkan kapasitas pemulihan penanganan pasca bencana	Belum Memadai	3	4	12
Legalisasi pembentukan klaster logistik tidak terealisasi karena kurangnya pemahaman Kepala Daerah akan pentingnya pembentukan klaster logistik	4	4	16	Ada	Melakukan pendamingan dalam pembentukan klaster logistik di Kab/Kota	Belum Memadai	3	4	12
Kurangnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	4	5	20	Ada	Meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum Memadai	4	4	16
Terhambatnya pencapaian tujuan organisasi	4	5	20	Ada	Dibentuk Tim Pengelolaan Risiko, melaksanakan Rapat Pengendalian secara berkala sebagai upaya pemantauan pengelolaan risiko	Belum Memadai	4	4	16
Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja	4	4	16	Ada	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi program kegiatan	Belum Memadai	3	4	12
Ketidakpuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di bidang bencana dapat memberikan	4	5	20	Ada	Adanya Kebijakan dalam memberikan kemudahan akses informasi dan akses pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
penilaian buruk untuk BPBD									
Kurangnya koordinasi dan pemantauan antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	4	4	16	Ada	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	Belum Memadai	3	4	12

c. Penetapan Risiko Prioritas

Risiko prioritas merupakan risiko yang akan dilakukan tindak pengendalian lebih lanjut. Penetapan risiko prioritas berdasarkan pada skala atau level risiko serta selera risiko yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, dan/atau kategori sedang.

Tabel Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Kurangnya upaya mitigasi yang berkelanjutan	16	Kalakhar	Keterbatasan kapasitas dan pengetahuan daerah dalam merancang dan melaksanakan mitigasi yang efektif	Memperbesar risiko dan dampak bencana
Kurangnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di BPBD	16	Kalakhar	Kurangnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPBD	Kurangnya kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola organisasi
Kurangnya kesiapan daerah dalam menghadapi bencana	16	Kalakhar	Minimnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor	Menurunkan ketahanan daerah
Terhambatnya pencapaian tujuan organisasi	16	Kalakhar	Kurangnya kemampuan dalam mengelola risiko	Tujuan organisasi tidak tercapai sesuai target
Ketidakpuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di bidang bencana dapat memberikan penilaian buruk untuk BPBD	16	Kalakhar	Kurangnya kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan publik	Pelaksanaan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana dinilai tidak optimal
Meningkatnya dampak negatif bencana bagi kehidupan masyarakat	12	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan untuk peningkatakan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Menurunkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
Semakin meluasnya dampak bencana	12	Kepala Bidang Penanganan Darurat	Kurangnya kapasitas penanganan darurat bencana di tingkat pemerintah daerah dan relawan	Menurunnya kemampuan pemerintah daerah dan relawan dalam merespon keadaan darurat
Keterlambatan dalam penanganan pemulihan pasca bencana	12	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam rencana pemulihan pasca bencana	Menurunnya kualitas kehidupan masyarakat pasca terdampak bencana
Legalisasi pembentukan klaster logistik tidak terealisasi karena kurangnya pemahaman Kepala Daerah akan pentingnya pembentukan klaster logistik	12	Kepala Bidang Logistik dan Peralatan	Kurangnya koordinasi dan sosialisasi dengan Kab/Kota dalam merencanakan pembentukan klaster logistik	Kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana karena terhambatnya koordinasi kebutuhan logistik dengan Kab/Kota
Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi	12	Kepala Bagian Tata Usaha	Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap realisasi program dan kegiatan yang tidak	Kinerja organisasi kurang maksimal karena tidak dapat memenuhi/mencapai target kinerja yang

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
yang efektif terhadap realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja			memenuhi target kinerja	direncanakan
Kurangnya koordinasi dan pemantauan antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	12	Kepala Bagian Tata Usaha	Kurangnya pengawasan dan pengendalian internal	Meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan aset, laporan keuangan yang tidak akuntabel, dan kinerja organisasi tidak optimal

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Rencana Tindak Pengendalian ini yang menjadi dasar dalam memastikan bahwa perencanaan yang disusun telah berbasis pada risiko. Dipastikan bahwa RTP yang ditetapkan menjadi aktivitas perangkat daerah. Tabel RTP yang dituangkan dalam Bab IV Renstra PD.

Tabel Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan PD: Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Kurangnya upaya mitigasi yang berkelanjutan	16	Keterbatasan kapasitas dan pengetahuan daerah dalam merancang dan melaksanakan mitigasi yang efektif	Memperbesar risiko dan dampak bencana	Meningkatkan upaya mitigasi bencana (melakukan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan seperti penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, pembuatan peta wilayah rawan bencana, pelatihan evakuasi, dan simulasi bencana)	Kalakhar	2025-2029
Sasaran PD: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kurangnya kesiapan daerah dalam menghadapi bencana	16	Minimnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor	Menurunkan ketahanan daerah	Melaksanakan koordinasi dan melakukan sosialisasi terkait peniliaian Indeks Ketahanan Daerah dengan Kab/Kota (Sosialisasi dan Desk Penilai IKD)	Kalakhar	2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran Program Penanggulangan Bencana:								
Meningkatnya kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Meningkatnya dampak negatif bencana bagi kehidupan masyarakat	12	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan untuk peningkatakan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Menurunkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Menyelenggarakan penyuluhan/edukasi/pelatihan tentang kebencanaan kepada masyarakat dan atau membuat surat edaran tentang kebijakan dalam peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2025-2029
Meningkatnya kapasitas Kab/Kota dalam penanganan bencana	Persentase Kab/Kota yang mendapat pendampingan Provinsi dalam penanganan bencana	Semakin meluasnya dampak bencana	12	Kurangnya kapasitas penanganan darurat bencana di tingkat pemerintah daerah dan relawan	Menurunnya kemampuan pemerintah daerah dan relawan dalam merespon keadaan darurat	Peningkatan kapasitas penanganan darurat melalui rapat koordinasi dan pendampinganPembentukan Tim TRC maupun pelatihan	Kepala Bidang Penanganan Darurat	2025-2029
Meningkatnya kapasitas Kab/Kota dalam pemulihan pasca bencana	Persentase Kab/Kota yg mendapat pendampingan Provinsi dalam pemulihan pasca bencana	Keterlambatan dalam penanganan pemulihan pasca bencana	12	Kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam rencana pemulihan pasca bencana	Menurunnya kualitas kehidupan masyarakat pasca terdampak bencana	Kebijakan dalam penanganan pemulihan pasca bencana (adanya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan atau Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2025-2029
Meningkatnya kapasitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Persentase Kab/Kota yang mengaktivasi klaster logistik	Legalisasi pembentukan klaster logistik tidak terealisasi	12	Kurangnya koordinasi dan sosialisasi dengan	Kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Melakukan pendamingan atau fasilitasi dalam pembentukan klaster logistik di Kab/Kota	Kepala Bidang Logistik dan Peralatan	2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		karena kurangnya pemahaman Kepala Daerah akan pentingnya pembentukan klaster logistik		Kab/Kota dalam merencanakan pembentukan klaster logistik	karena terhambatnya koordinasi kebutuhan logistik dengan Kab/Kota			
Tujuan PD: Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kurangnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di BPBD	16	Kurangnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Kurangnya kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola organisasi	Meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (melaksanakan POK dan Laporan/Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB)	Kalakhar	2025-2029
Sasaran PD: Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Terhambatnya pencapaian tujuan organisasi	16	Kurangnya kemampuan dalam mengelola risiko	Tujuan organisasi tidak tercapai sesuai target	Dibentuk Tim Pengelolaan Risiko dengan SK Kalakhar, melaksanakan Rapat POK sebagai upaya pemantauan pengelolaan risiko	Kalakhar	2025-2029
Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:								
Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Tindak lanjut/perbaikan tidak optimal saat target meleset dari rencana	12	Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja	Kinerja organisasi kurang maksimal karena tidak dapat memenuhi/mencapai target kinerja yang direncanakan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi program kegiatan (melakasanakan Rapat Pengendalian)	Kepala Bagian Tata Usaha	2025-2029
Sasaran PD: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Ketidakpuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di bidang bencana	16	Kurangnya kecepatan dan ketepatan dalam memberikan	Pelaksanaan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana dinilai tidak	Adanya Kebijakan dalam memberikan kemudahan akses informasi dan akses pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana	Kalakhar	2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dapat memberikan penilaian buruk untuk BPBD		pelayanan publik	optimal	(SOP dan Laporan SKM)		
Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:								
Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kurangnya koordinasi dan pemantauan antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	12	Kurangnya pengawasan dan pengendalian internal	Meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan aset, laporan keuangan yang tidak akuntabel, dan kinerja organisasi tidak optimal	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan (melakasanakan Rapat Pengendalian)	Kepala Bagian Tata Usaha	2025-2029

DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta Masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan Pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan daerah itu juga harus mendukung pencapaian target Pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik masing – masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional. Berdasarkan konsep Pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk memeratakan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan secara serentak untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Periode 2025-2030. Periode pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Gubenur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj. Yasin Maimoen pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah **“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”**. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan pada 6 (enam) misi, yaitu: 1) Meningkatkan layanan dasar yang

inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global; 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sector unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsive dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai - nilai integritas; 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencnaan tata ruang yang responsif; 5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya local, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; dan 6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut telah disusunya RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 maka perangkat daerah juga berkewajjiban untuk menyusun Renstra PD tahun 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen Renstra PD Tahun 2025 - 2029 yang disusun dan ditetapkan kemudian akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya untuk urusan pendidikan pada tahun 2025 – 2029 . Dokumen Renstra Tahun 2025 - 2029 akan menjadi pedoman penyusunan penyusunan Renja PD.

Renstra PD Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program prioritas perangkat daerah dengan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah serta prioritas pembangunan nasional Asta Cita, sesuai dengan kewenangan dan kondisi Provinsi Jawa Tengah. Renstra PD berpedoman pada RPJMD dan juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, serta RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020-2024;
2. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029 terutama pada substansi isu strategis, dan arah kebijakan;

3. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah; serta
4. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik tematik, integratif, serta spasial.

Renstra PD Tahun 2025-2029 yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang dijabarkan setiap tahun. Keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan di jelaskan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan antar dokumen perencanaan

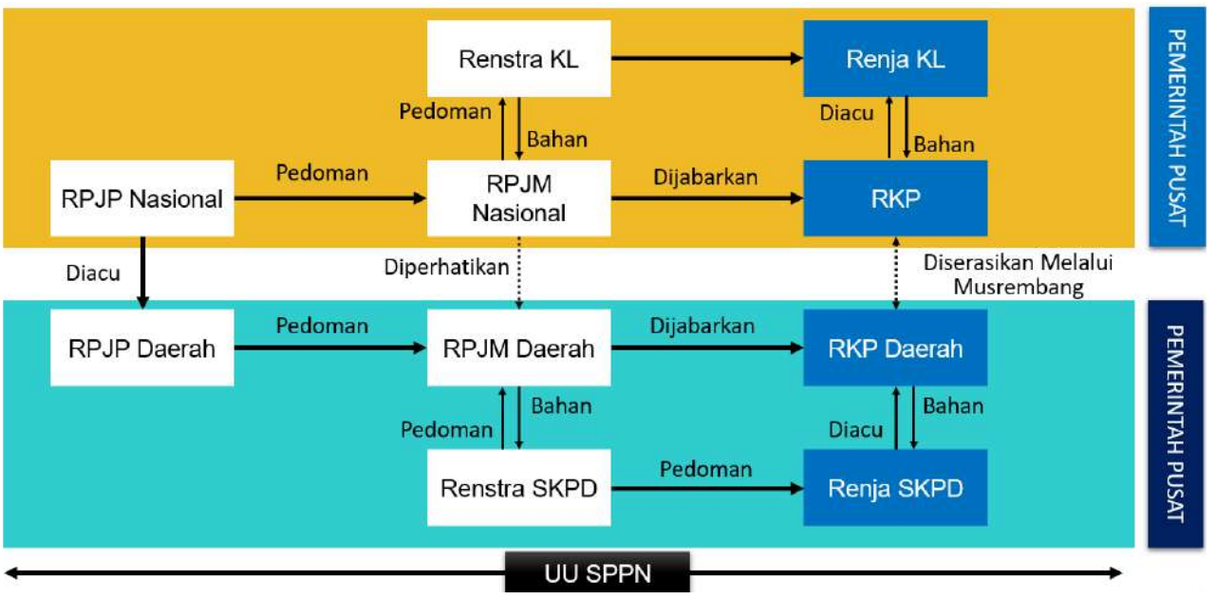

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan Rancangan Awal Renstra dengan tahapan analisis data dan informasi, evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2024 – 2026 serta tetap

memperhatikan capaian Renstra Tahun 2018 - 2023, perumusan isu strategis, perumusan pohon kinerja dan cascading, dan penyusunan dokumen draft rancangan awal Rentsra;

2) Penyusunan rancangan Renstra PD;
3) Pelaksanaan forum PD
4) Perumusan rancangan akhir Renstra PD

Penyusunan dokumen Renstra dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan dokumen Renja PD. Secara substansi, penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029 tetap memperhatikan beberapa hal antara lain:

1) Penyelarasan target indikator daerah dan program prioritas RPJMD;
2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029;
3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Rentra Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Tahun 2024 - 2026;
4) Isu-isu strategis yang berkembang;
5) Kebijakan nasional; dan
6) Regulasi yang berlaku saat ini.

Selain itu, perumusan isu strategis dan kebijakan Rancangan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 juga memperhatikan keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

13. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susuan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menjabarkan sasaran, tujuan, program dan kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Meningkatkan Kualitas SDM Jawa Tengah. Adapun tujuan dari Penyusunan Renstra yaitu sebagai pedoman :

1. Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan;
2. Perencanaan dalam penyusunan rencana kerja tahunan;

3. Instrumen pengendalian dan evaluasi tahunan.

1.1. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan
- 3.3. Manajemen Risiko Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

BAB V : PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Tugas pokok Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pendidikan menengah atas, bidang pendidikan menengah kejuruan, bidang pendidikan khusus, bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan menengah atas, bidang pendidikan menengah kejuruan, bidang pendidikan khusus, bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan menengah atas, bidang pendidikan menengah kejuruan, bidang pendidikan khusus, bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pembinaan SMA, Bidang Pembinaan SMK, Bidang Pembinaan Diksus, Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Cabang Dinas, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Adapun tugas fungsi Sekretariat/Bidang/Balai dan UPT adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

   Mempunyai tugas menyiapkan urusan pimpinan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun fungsi dari sekretariat adalah:

   a. koordinasi penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan serta anggaran di lingkungan dinas
   b. koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas
   c. Koordinasi tugas pembantuan dan non kewenangan
   d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi Bidang Ketatausahaan, Kepegawaian, Hukum, Kerumahtanggaan,

Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Kearsipan di lingkungan Dinas

e. koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
f. koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
g. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
h. koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan dinas
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Bidang Pembinaan SMA

Mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, serta tugas lain pada Sekolah Menengah Atas. Adapun fungsi dari Bidang Pembinaan SMA adalah:

a. Perumusan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Atas;
b. Pelaksanaan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Atas;
c. Pembinaan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Atas;
d. Evaluasi dan pelaporan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Atas;
e. Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3. Bidang Pembinaan SMK

Mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, serta tugas lain pada Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun fungsi dari Bidang Pembinaan SMK adalah:

a. Perumusan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Kejuruan
b. Pelaksanaan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Kejuruan
c. Pembinaan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Kejuruan
d. Evaluasi dan pelaporan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada Sekolah Menengah Kejuruan

e. Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus

Mempunyai tugas Perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, serta tugas lain pada pembinaan pendidikan khusus. Adapun fungsi dari Bidang Pembinaan Diksus adalah:

a. Perumusan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada pendidikan khusus
b. Pelaksanaan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada pendidikan khusus
c. Pembinaan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada pendidikan khusus
d. Evaluasi dan pelaporan kebijakan perluasan akses, kelembagaan dan tata kelola, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, serta kerjasama pada pendidikan khusus
e. Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

5. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.

Mempunyai tugas, penyiapan kebijakan koordinasi pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, serta tugas lain pada bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugasnya bidang Guru dan Tenaga Kependidikan memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan karier, perlindungan profesi, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan karier, perlindungan profesi, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
c. Layanan pembinaan dan pengembangan karier, perlindungan profesi, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
d. Evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan dan pengembangan karier, perlindungan profesi, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
e. Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Guna melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dibentuk cabang dinas. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. Cabang Dinas Pendidikan melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional sub urusan Pengelolaan dan Penyelenggaraan sub urusan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan Pengelolaan dan Penyelenggaraan sub urusan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa

3. Evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa
4. Pengelolaan ketatausahaan administrasi perkantoran dan kepegawaian Cabang Dinas
5. Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memiliki 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD. UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai/ Taman Budaya / Museum di lingkungan Dinas Pendidikan. UPTD Dinas Pendidikan yaitu :

1. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A yang mempunyai tugas Pengelolaan Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran. Fungsi dari balai pengembangan teknologi pendidikan dan mutu pembelajaran kelas A sebagai berikut:
   a. Penyusunan perumusan perencanaan, kebijakan teknis, teknologi pendidikan dan mutu pembelajaran pada SMA, SMK, SLB.
   b. Koordinasi dan pelaksanaan peningkatan teknologi pendidikan dan mutu pembelajaran pada SMA, SMK, SLB.
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknologi pendidikan dan mutu pembelajaran pada SMA, SMK, SLB.
   d. Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selanjutnya struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

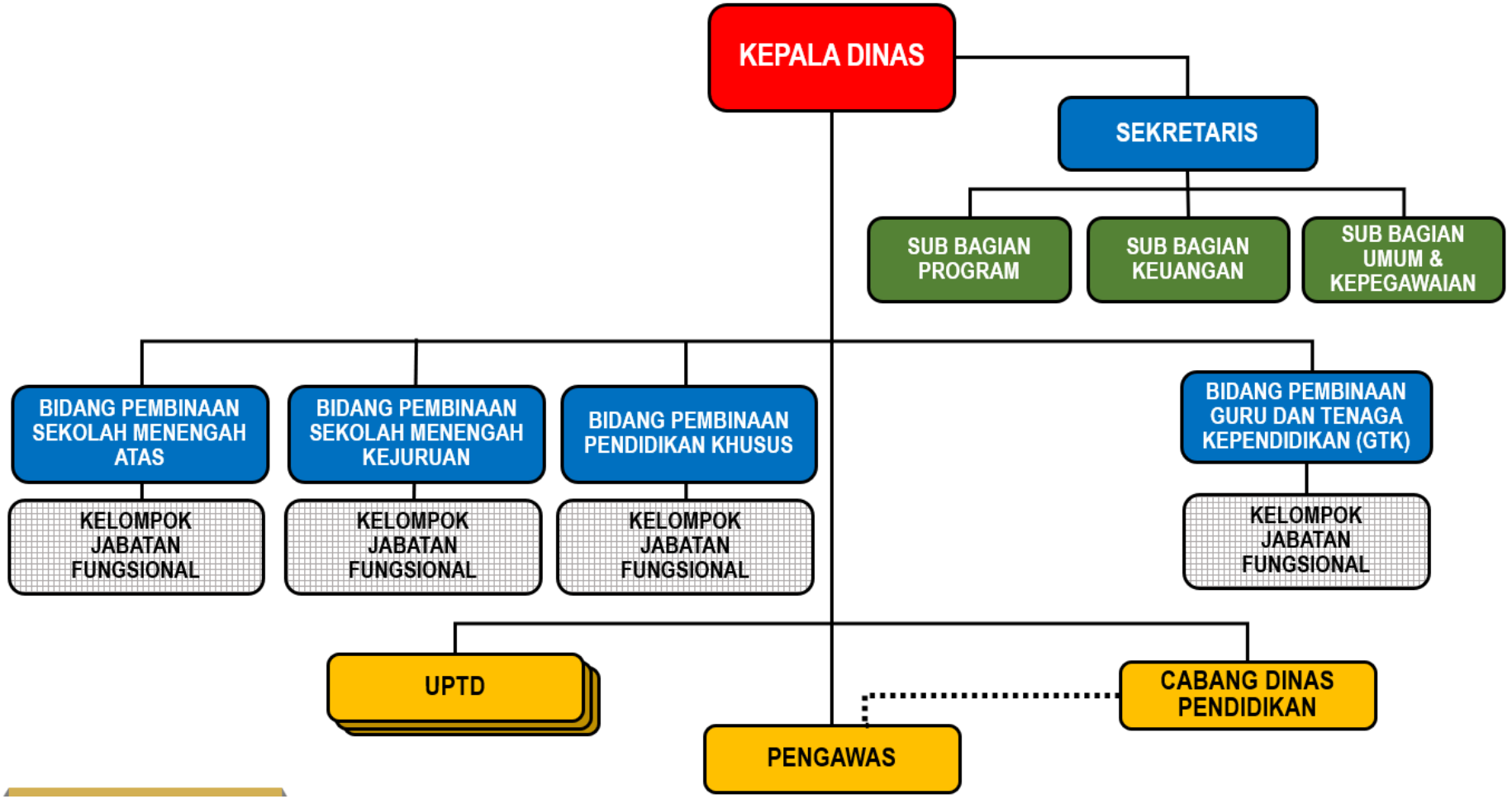

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Tahun 2024 sebanyak 35.654 orang, sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S3	20 orang
2	S2	3.337 orang
3	S1	30.771 orang
4	SM Non. AK	1 orang
5	D4	84 orang
6	D3	204 orang
7	D2	225 orang
8	D1	7 orang
9	SMA	869 orang
10	SMP	109 orang
11	SD	27 orang
	Total	**35.654 orang**

Sumber : Buku Profil Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 cut off Desember 2024

B. Sumber Daya Aset

Sumber daya aset ini merupakan hasil dari modal yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang tersebar pada UPT/Balai dan 12 Cabang Dinas. Adapun rincian data aset Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Aset Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

No.		Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2024		PENAMBAHAN								PELEPASAN				SALDO AKHIR Periode 202412	
													REKLASIFIKASI					
			Jml.	Harga	Jml.	Belanja Modal	Jml.	Hibah	Jml.	Mutasi Masuk	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Ke Aset Lainnya	Jml.	Jumlah Kurang	Jml.	Harga
						BMD		HBH		MMK				KIBL				
1		2	3		4		7		9		14		17		22		23	
1	1.3.1.01	TANAH	5	69.528.600.000	-	-	1	2.085.246.000	-	-	1	2.085.246.000	-	-	-	-	6	71.613.846.000
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	6	1.675.775.309	1	199.500.000	-	-	-	-	1	199.500.000	-	-	-	-	7	1.875.275.309
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	26	4.494.544.700	-	-	-	-	1	14.950.000	1	14.950.000	-	-	-	-	27	4.509.494.700
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.440	18.541.885.706	65	398.080.000	-	-	-	-	65	398.080.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3.504	18.938.965.706
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	394	4.087.564.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394	4.087.564.444
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	67	529.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	529.050.000
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	796	15.876.129.660	33	529.850.000	-	-	-	-	33	529.850.000	2	10.259.524	2	10.259.524	827	16.395.720.136
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	12	12.834.839.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12.834.839.400
22	1.3.3.02	MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3	573.193.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	573.193.250
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.3.4.03	INSTALASI	3	688.085.152	3	44.721.750	-	-	-	-	3	44.721.750	-	-	-	-	6	732.806.902
28	1.3.4.04	JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	10.385	343.974.164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.385	343.974.164
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	12	68.919.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	68.919.000
31	1.3.5.03	HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15.149	129.242.560.785	102	1.172.151.750	1	2.085.246.000	1	14.950.000	104	3.272.347.750	3	11.259.524	3	11.259.524	15.250	132.503.649.011

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pendidikan

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menyediakan alat ukur, dengan menetapkan Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat *(core business)* yang diemban. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan.

Berikut ditampilkan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dari tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
A	RENSTRA PD TAHUN 2018 - 2023																						
1	Tujuan PD																						
	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%		7,37		7,28	7,25	7,1	7	6,79		12,68	12,92	8,78	8,67	9,95		57,41	56,11	80,87	80,74	68,24	
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka		70		72	74	76	78	80		72,15	80,13	97,06	97,3	98,02		100,21	108,28	127,71	124,74	122,53	
2	Sasaran PD																						
	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	%		0,06		0,07	0,07	0,08	0,08	0,08		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07		100	100	87,5	87,5	87,50	
	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi akademik	%		82,15		87,5	89,5	90,75	91,5	91,55		97,44	98,85	99,06	99,85	99,5		111,36	110,45	109,16	109,13	108,68	
	APK SMA/SMK/SLB	%		46,72		47,04	47,36	47,68	48	48,32		49,65	83,99	74,15	81,84	83,65		105,55	177,34	155,52	170,5	173,12	
	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai stadar	%		76,01		77,07	77,98	78,79	79,59	80,43		78,14	83,48	81,93	83,83	92,78		101,39	107,05	103,99	105,33	115,35	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Angka		70		80,25	80,5	80,75	81	81,25		72,15	77,81	75,88	77,04	98,02		89,91	96,66	93,97	95,11	120,64	
3	**Program**																						
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum,	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	kepegawaian dan keuangan perangkat daerah																						
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100,00	
	APK SLB	%		65,39		65,74	66,09	66,44	66,79	67,14		65,91	84,37	68,78	89,16	91,73		100,26	127,66	103,52	133,5	136,62	
	APK SLB	%		63,79		64,14	64,49	64,84	65,19	65,54		168,35	219,63	164,78	143,1	156,47		262,47	340,56	254,13	219,52	238,74	
	APK SLB	%		72,26		72,61	72,96	73,31	73,66	74,01		31,6	40,36	53,61	110,37	114,94		43,52	55,32	73,13	149,83	155,30	
	APK SLB	%		47,34		47,69	48,04	48,39	48,74	49,09		71,3	91,71	71,77	122,07	143,67		149,51	190,9	148,32	250,45	292,67	
	APK SLB	%		62,36		62,71	63,06	63,41	63,76	64,11		45,6	62,35	63,07	1142,17	182,45		72,72	98,87	99,46	1791,36	284,59	
	APK SLB	%		69,89		70,24	70,59	70,94	71,29	71,64		114,62	138,83	116,33	134,05	172,19		163,18	196,67	163,98	188,03	240,35	
	APK SLB	%		87,19		87,54	87,89	88,24	88,59	88,94		111,63	141,42	109,69	73,33	132,65		127,52	160,91	124,31	82,77	149,15	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	APK SLB	%		59,33		59,68	60,03	60,38	60,73	61,08		187,34	251,96	187,86	195,79	289,93		313,91	419,72	311,13	322,4	474,67	
	APK SLB	%		68,34		68,69	69,04	69,39	69,74	70,09		68,69	66,67	66,84	57,64	70		100	96,57	96,33	82,65	99,87	
	APK SLB	%		64,51		64,86	65,21	65,56	65,91	66,26		48,15	64,36	49,12	69,56	62,31		74,24	98,7	74,92	105,54	94,04	
	APK SLB	%		39,9		40,26	40,6	40,95	41,3	41,65		41,49	54,05	13,68	67,98	77,72		103,06	133,13	33,41	164,6	186,60	
	APK SLB	%		63,2		63,55	63,89	64,24	64,59	64,94		63,55	31,68	25,56	61,83	56,7		100	49,59	39,79	95,72	87,31	
	APK SLB	%		65,13		65,48	65,83	66,18	66,53	66,88		41,31	56,13	44,17	51,34	68,03		63,09	85,27	66,74	77,17	101,72	
	APK SLB	%		81,48		81,83	82,18	82,53	82,88	83,23		73,86	97,27	79,99	96,29	111,37		90,26	118,36	96,92	116,18	133,81	
	Disparitas prestasi SLB	%		1,15		1,05	0,95	0,85	0,75	0,65		0,63	0,45	2,6				60	47,37	305,88	0	0,00	
	Disparitas prestasi SLB	%		7,91		7,81	7,71	7,61	7,51	7,41		0	0	80,11				0	0	1052,69	0	0,00	
	Disparitas prestasi SLB	%		0,52		0,42	0,32	0,22	0,12	0,02		0	0	1				0	0	454,55	0	0,00	
	Disparitas prestasi SLB	%		0,56		0,46	0,36	0,26	0,16	0,06		0	0	1,33				0	0	511,54	0	0,00	
	Disparitas prestasi SLB	%		0,5		0,4	0,3	0,2	0,1	0,01		0,4	0	0				100	0	0	0	0,00	
	Disparitas prestasi SLB	%		0,78		0,68	0,58	0,48	0,38	0,28		1	1	1				147,06	172,41	208,33	0	0,00	
	Disparitas prestasi SLB	%		0,65		0,55	0,45	0,35	0,25	0,15		1,33	0	1,33				241,82	0	380	0	0,00	
	Disparitas prestasi SLB	%		0,64		0,54	0,44	0,34	0,24	0,14		1,5	0	0,5				277,78	0	147,06	0	0,00	
	Disparitas prestasi SLB	%		0,61		0,51	0,41	0,31	0,21	0,11		0,51	1,17	0,45				100	285,37	145,16	0	0,00	
	Disparitas prestasi SLB	%		0,66		0,56	0,46	0,36	0,26	0,16		0	0,5	3,17				0	108,7	880,56	0	0,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Disparitas prestasi SLB	%		0,52		0,42	0,32	0,22	0,12	0,02		1	1	3,5				238,1	312,5	1590,91	0	0,00	
	Disparitas prestasi SLB	%		0,5		0,4	0,3	0,2	0,15	0,1		0	0	0				0	0	0	0	0,00	
	Disparitas prestasi SLB	%		0,52		0,42	0,32	0,22	0,12	0,02		0	0	0				0	0	0	0	0,00	
	Disparitas prestasi SLB	%		0,56		0,46	0,36	0,26	0,16	0,06		0,67	0	2				145,65	0	769,23	0	0,00	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		80,79		80,83	80,89	80,96	81	81,13		81,83	87,84	86,98	87,32	87,93		101,24	108,59	107,44	107,81	108,38	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		81,09		81,12	81,18	81,25	81,29	81,42		87,5	89,72	89,1	90,02	90,4		107,86	110,52	109,66	110,74	111,03	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		87,62		87,65	87,71	87,78	87,82	87,95		85,07	98,59	94,92	97,3	98,65		97,06	112,4	108,13	110,79	112,17	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		78,45		78,51	78,57	78,64	78,69	78,81		82,8	84,94	85,21	86,67	87,5		105,46	108,11	108,35	110,14	111,03	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		75,44		75,47	75,53	75,6	75,64	75,77		70,97	80,85	77,46	84,77	99,4		94,04	107,04	102,46	112,07	131,19	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		76,44		76,47	76,53	76,6	76,64	76,77		85,07	94,51	52,29	92,57	94,67		111,25	123,49	68,26	120,78	123,32	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		85,17		85,2	85,26	85,33	85,37	85,5		80,12	87,27	85,3	86,64	86,64		94,04	102,36	99,96	101,48	101,33	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		79,47		79,5	79,56	79,63	79,67	79,8		85,71	86,3	80,95	83,97	90,33		107,81	108,47	101,66	105,39	113,20	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		80,16		80,19	80,25	80,32	80,36	80,49		79,07	80,69	80,81	85,97	81,05		98,6	100,55	100,61	106,98	100,70	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		81,32		81,35	81,41	81,48	81,53	81,65		76,26	81,86	78,06	83,02	82,95		93,74	100,55	95,8	101,83	101,59	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		69,23		69,27	69,33	69,4	69,44	69,57		64,91	89,11	100	87,97	87,97		93,71	128,53	144,09	126,68	126,45	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		96,85		96,88	96,94	97,01	97,05	97,18		82,35	91,67	92,42	87,14	87,14		85	94,56	95,27	89,79	89,67	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		84,35		84,38	84,44	84,52	84,56	84,68		86,29	92,17	90,32	85,84	88,94		102,26	109,15	106,86	101,52	105,03	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%		74,7		74,73	74,79	74,86	74,9	75,03		73	81,08	80,17	80,8	81,6		97,68	108,41	107,09	107,88	108,76	
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		97,82		97,85	97,88	97,91	97,94	97,97		97,9	98,11	99,98	100	100		100,05	100,23	102,11	102,1	102,07	
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		96,56		96,59	96,62	96,65	96,68	96,71		98,04	98,1	100	100	100		101,5	101,53	103,47	103,43	103,40	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		98,56		98,59	98,62	98,65	98,68	98,71		98,1	98,66	100	100	100		99,5	100,04	101,37	101,34	101,31	
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		97,66		97,69	97,72	97,75	97,78	97,81		98,63	98,51	100	100	100		100,96	100,81	102,3	102,27	102,24	
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		98,76		98,79	98,82	98,85	98,88	98,91		99,92	99,32	100	100	100		101,14	100,51	101,16	101,13	101,10	
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		96,46		96,49	96,52	96,55	96,58	96,61		97,3	97,35	120,72	100	100		100,84	100,86	125,03	103,54	103,51	
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		97,63		97,66	97,69	97,72	97,75	97,78		96,67	97,79	100	100	100		98,99	100,1	102,33	102,3	102,27	
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		98,81		98,84	98,87	98,9	98,93	98,96		99,47	99	100	100	100		100,64	100,13	101,11	101,08	101,05	
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		97,52		97,55	97,58	97,61	97,64	97,67		97,55	97,61	98,53	100	100		100	100,03	100,94	102,42	102,39	
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		98,73		98,76	98,79	98,82	98,85	98,88		96,25	98,92	100	100	100		97,46	100,13	101,19	101,16	101,13	
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		97,91		97,94	97,97	98	98,03	98,06		97,76	98,08	100	100	100		99,82	100,11	102,04	102,01	101,98	
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		98,68		98,71	98,74	98,77	98,8	98,83		97,4	98,91	98,91	100	100		98,67	100,17	100,14	101,21	101,18	
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		96,54		96,57	96,6	96,63	96,66	96,69		96,57	96,7	100	100	100		100	100,1	103,49	103,46	103,42	
	Persentase serapan kurikulum SLB	%		97,86		97,89	97,92	97,95	97,98	98,01		97,89	98,08	100	100	100		100	100,16	102,09	102,06	102,03	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	APK SMK	%		48,09		48,36	48,63	48,91	49,18	49,46		54,44	54,88	49,02	52,59	53,51		112,57	112,85	100,22	106,93	108,19	
	APK SMK	%		48,38		48,68	48,98	49,28	49,58	49,88		46,78	46,53	47,2	50,29	50,14		96,1	95	95,78	101,44	100,52	
	APK SMK	%		31,98		32,33	32,68	33,03	33,38	33,73		34,52	42,71	34,48	43,15	40,3		106,77	130,69	104,39	129,27	119,48	
	APK SMK	%		35,58		35,93	36,28	36,63	36,98	37,33		49,52	49,99	41,56	44,92	46,56		137,82	137,79	113,46	121,47	124,73	
	APK SMK	%		41,42		41,72	42,02	42,32	42,62	42,92		41,72	43,77	44,45	45,16	47,65		100	104,16	105,03	105,96	111,02	
	APK SMK	%		58,21		58,42	58,62	58,83	59,04	59,24		58,35	58,61	54,49	56,1	73,41		99,88	99,98	92,62	95,02	123,92	
	APK SMK	%		50,37		50,62	50,87	51,12	51,37	51,62		55,97	55,97	52,54	52,25	52,25		110,57	110,03	102,78	101,72	101,22	
	APK SMK	%		72,51		72,65	72,78	72,92	73,05	73,19		63,43	63,13	64,43	64,17	62,25		87,31	86,74	88,36	87,84	85,05	
	APK SMK	%		54,27		54,52	54,77	55,02	55,27	55,52		50,36	50,53	50,66	47,91	52,35		92,37	92,26	92,08	86,68	94,29	
	APK SMK	%		43,15		43,46	43,78	44,09	44,4	44,71		53,83	53,88	47,32	54,4	55,12		123,86	123,07	107,33	122,52	123,28	
	APK SMK	%		55,72		55,97	56,22	56,47	56,72	56,97		65,32	66,15	53,41	53,97	60,12		116,71	117,66	94,58	95,15	105,53	
	APK SMK	%		54,72		54,9	55,09	55,27	55,46	55,64		54,9	65,61	50,91	56,71	57,13		100	119,1	92,11	102,26	102,68	
	APK SMK	%		36,03		36,38	36,73	37,08	37,43	37,78		58,29	59,71	56,03	58,97	60,61		160,23	162,56	151,11	157,55	160,43	
	APK SMK	%		41,83		42,18	42,53	42,88	43,23	43,58		58,8	59,83	51,59	57,59	55,29		139,4	140,68	120,31	133,21	126,87	
	Disparitas prestasi SMK	%		1,05		1,04	1,04	1,03	1,03	1,02		1,03	0,55	1,9				99,04	52,88	184,47	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMK	%		2,8		2,75	2,7	2,65	2,6	2,55		0,5	0,5	5				18,18	18,52	188,68	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMK	%		0,86		0,85	0,84	0,83	0,82	0,81		0,5	0,5	0,5				58,82	59,52	60,24	0	0,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Disparitas prestasi SMK	%		2,06		2,01	1,96	1,91	1,86	1,81		1,33	1,33	10,67				66,17	67,86	558,64	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMK	%		0,36		0,35	0,34	0,33	0,32	0,31		0,5	0	0,5				142,86	0	151,52	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMK	%		0,92		0,91	0,9	0,89	0,88	0,87		0,67	0,67	8,67				73,63	74,44	974,16	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMK	%		0,77		0,76	0,75	0,74	0,73	0,72		2,67	0	2,67				351,32	0	360,81	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMK	%		2,03		1,98	1,93	1,88	1,83	1,78		3,5	1	6,5				176,77	51,81	345,74	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMK	%		0,86		0,85	0,84	0,83	0,82	0,81		0,85	1	0				100	119,05	0	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMK	%		1,01		1	0,99	0,98	0,97	0,96		1,17	1	4,5				117	101,01	459,18	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMK	%		0,89		0,88	0,87	0,86	0,85	0,84		0,5	0,5	8				56,82	57,47	930,23	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMK	%		0,28		0,27	0,26	0,25	0,24	0,23		0,27	0,5	0,5				100	192,31	200	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMK	%		0,62		0,61	0,6	0,59	0,58	0,59		2	1,33	2,67				327,87	221,67	452,54	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMK	%		0,56		0,55	0,54	0,53	0,52	0,51		0,67	0	4				121,82	0	754,72	0	0,00	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		83,64		84,77	85,46	85,82	86,17	86,54		85,23	88,78	88,25	89,36	89,25		100,54	103,88	102,83	103,7	103,13	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		73,81		74,46	75,11	75,76	76,41	77,06		85,23	85,3	88,66	89,1	89,1		114,46	113,57	117,03	116,61	115,62	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		74,61		75,26	75,91	76,56	77,21	77,86		80,77	99,39	87,5	87,64	88,5		107,32	130,93	114,29	113,51	113,67	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		73,37		74,02	74,67	75,32	75,97	76,62		83,48	90,16	85,12	90,13	90,26		112,78	120,74	113,01	118,63	117,80	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		66,13		66,78	67,43	68,08	68,73	69,38		78,31	85,84	84,75	86,43	86,43		117,27	127,3	124,49	125,76	124,57	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		74,02		74,67	75,32	75,97	76,62	77,27		84,77	89,78	58,78	89,72	89,74		113,53	119,2	77,37	117,1	116,14	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		86,84		87,49	88,14	88,79	89,44	90,09		87,52	88,22	87,15	89,55	90,09		100,03	100,09	98,15	100,12	100,00	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		81		81,65	82,3	82,95	83,6	84,25		85,94	92,28	92,17	93,28	86,1		105,25	112,13	111,12	111,58	102,20	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		70,74		71,39	72,04	72,69	73,34	73,99		71,39	88,57	88,84	88,41	88,95		100	122,95	122,22	120,55	120,22	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		81,43		82,08	82,73	83,38	84,03	84,68		88,55	89,97	89,61	89,9	89,9		107,88	108,75	107,47	106,99	106,16	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		75,73		76,38	77,03	77,68	78,33	78,98		84,97	88,21	90,81	88,94	89,39		111,25	114,51	116,9	113,55	113,18	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		71,79		72,44	73,09	73,74	74,39	75,04		72,44	89,11	88,11	89,49	89,68		100	121,92	119,49	120,3	119,51	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		76,91		77,56	78,21	78,86	79,51	80,16		85,49	90,63	90,01	90,91	90,91		110,22	115,88	114,14	114,34	113,41	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%		75,52		76,17	76,82	77,47	78,12	78,77		84,17	84,45	84	86,93	86,93		110,5	109,93	108,43	111,28	110,36	
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		96,48		98,96	100	100	78,81	100		98,97	99	99,14	100	100		100,01	99	99,14	126,89	100,00	
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		90,2		97,3	100	100	80,11	100		100	100	100	100	100		102,77	100	100	124,83	100,00	
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		96,07		99,05	100	100	76,66	100		99,38	98,66	99,99	100	100		100,33	98,66	99,99	130,45	100,00	
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		97,75		99,21	100	100	78,42	100		99,59	99,61	97,89	100	100		100,38	99,61	97,89	127,52	100,00	
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		97,16		99,04	100	100	73,69	100		98	98,1	100	100	100		98,95	98,1	100	135,7	100,00	
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		93,99		98,03	100	100	79,69	100		99	99,03	101,87	100	99,86		100,99	99,03	101,87	125,49	99,86	
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		96,96		99,21	100	100	79,02	100		99,42	99,44	100	100	100		100,21	99,44	100	126,55	100,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		98,88		99,94	100	100	80,22	100		100	100	97,38	100	99,78		100,06	100	97,38	124,66	99,78	
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		92,49		96,85	100	100	82,95	100		76,95	99,37	99,42	100	100		79,45	99,37	99,42	120,55	100,00	
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		98,75		99,59	100	100	81,16	100		97,98	97,98	100	100	100		98,38	97,98	100	123,21	100,00	
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		98,13		99,55	100	100	79,45	100		98,42	98,46	99,01	100	99,52		98,86	98,46	99,01	125,87	99,52	
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		98,27		99,27	100	100	76,13	100		70,13	97,66	100	100	100		70,65	97,66	100	131,35	100,00	
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		97,92		99,88	100	100	78,1	100		98,89	98,9	98,94	100	100		99,01	98,9	98,94	128,04	100,00	
	Persentase serapan kurikulum SMK	%		97,63		99,6	100	100	78,1	100		100	100	100	100	99,96		100,4	100	100	128,04	99,96	
	Persentase SMK memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%		12,63		50,54	57,17	63,49	70,12	76,64		51,08	57,92	65,24	89,07	99,62		101,07	101,31	102,76	127,03	129,98	
	Persentase guru SLB	%		85,64		86,63	88,61	89,84	90,5	90,51		100	100	100	99,62	100		115,43	112,85	111,31	110,08	110,49	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	memenuhi kualifikasi akademik																						
	Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik	%		95,78		96,88	99,1	99,2	99,3	99,35		99,93	99,94	99,95	99,93	99,99		103,15	100,85	100,76	100,63	100,64	
	Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik	%		78,09		78,99	80,8	83,22	84,69	84,79		99,9	99,91	99,92	99,89	99,96		126,47	123,65	120,07	117,95	117,89	
	Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB	%		0,16		0,25	0,25	0,33	0,33	0,5		0,26	0,26	0,26	0,87	0,5		104	104	78,79	263,64	100,00	
	Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA	%		0,06		0,07	0,07	0,07	0,08	0,08		0,07	0,07	0,07	1,81	0,08		100	100	100	2262,5	100,00	
	Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK	%		0,07		0,07	0,07	0,08	0,08	0,08		0,07	0,07	0,08	1,92	0,08		100	100	100	2400	100,00	
	APK SMA	%		26,7		27,03	27,36	27,69	28,02	28,36		28,59	29,11	26,83	29,14	29,89		105,77	106,4	96,89	104,01	105,39	
	APK SMA	%		37,96		38,26	38,56	38,86	39,16	39,46		35,31	34,76	35,95	38,64	38,44		92,29	90,15	92,51	98,66	97,42	
	APK SMA	%		17,3		17,65	18	18,35	18,7	19,05		31,22	31,43	26,26	32,15	31,93		176,88	174,61	143,11	171,91	167,61	
	APK SMA	%		23,79		24,14	24,49	24,84	25,19	25,54		30,88	31,43	26,41	28,8	30,65		127,92	128,34	106,32	114,33	120,01	
	APK SMA	%		21,36		21,71	22,06	22,41	22,76	23,11		23,8	24,08	25,05	25,69	27,61		109,63	109,16	111,78	112,85	119,47	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	APK SMA	%		33,78		34,1	34,41	34,73	35,05	35,36		33,42	34,37	33,05	35,07	35,79		98,01	99,88	95,16	100,07	101,22	
	APK SMA	%		19,02		19,37	19,72	20,07	20,42	20,77		24,93	25,5	24,57	25,98	26,35		128,7	129,31	122,42	127,23	126,87	
	APK SMA	%		50,29		50,59	50,89	51,19	51,49	51,79		45,24	46,44	48,05	50,27	51,45		89,42	91,26	93,87	97,64	99,34	
	APK SMA	%		29,2		29,52	29,85	30,17	30,5	30,82		29,08	29,44	29,58	29,06	30,28		98,51	98,63	98,04	95,28	98,25	
	APK SMA	%		18,8		19,15	19,5	19,85	20,2	20,55		21,76	22,84	20,84	24,8	25,73		113,63	117,13	104,99	122,79	125,21	
	APK SMA	%		23,08		23,43	23,78	24,13	24,48	24,83		26,49	27,4	22,89	23,64	26,22		113,06	115,22	94,86	96,58	105,60	
	APK SMA	%		29,21		29,51	29,81	30,11	30,41	30,71		29,51	32,72	27,02	30,5	32,89		100	109,76	89,74	100,28	107,10	
	APK SMA	%		18,13		18,48	18,83	19,18	19,54	19,88		21,82	22,12	20,84	21,91	22,13		118,07	117,47	108,65	112,13	111,32	
	APK SMA	%		25,19		25,51	25,82	26,14	26,46	26,77		30,83	31,16	27,1	30,42	29,58		120,85	120,68	103,67	114,95	110,50	
	Disparitas prestasi SMA	%		0,98		0,98	0,97	0,96	0,95	0,93		0,96	1,45	9,82				97,96	149,48	1022,92	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMA	%		3,68		3,67	3,66	3,65	3,64	3,62		3,5	6,5	34,5				95,37	177,6	945,21	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMA	%		0,36		0,35	0,34	0,33	0,32	0,3		1	0,5	7,5				285,71	147,06	2272,73	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMA	%		1,5		1,49	1,48	1,47	1,46	1,44		3,33	0,67	5,33				223,49	45,27	362,59	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMA	%		0,29		0,28	0,27	0,26	0,25	0,23		0,5	0	1,5				178,57	0	576,92	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMA	%		0,91		0,9	0,89	0,88	0,87	0,85		2	1,33	24				222,22	149,44	2727,27	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMA	%		0,17		0,16	0,15	0,14	0,13	0,11		1,33	0	4				831,25	0	2857,14	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMA	%		0,86		0,85	0,85	0,85	0,85	0,83		1	0,5	0,5				117,65	58,82	58,82	0	0,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Disparitas prestasi SMA	%		1,27		1,26	1,25	1,24	1,23	1,21		1,67	0,67	0				132,54	53,6	0	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMA	%		0,71		0,7	0,69	0,68	0,67	0,65		1,5	1,17	8				214,29	169,57	1176,47	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMA	%		1,57		1,56	1,55	1,54	1,53	1,51		1,5	1,5	18,5				96,15	96,77	1201,3	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMA	%		0,82		0,81	0,81	0,81	0,8	0,79		0,81	1	7				100	123,46	864,2	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMA	%		0,33		0,32	0,31	0,3	0,29	0,27		1,33	0	3,33				415,63	0	1110	0	0,00	
	Disparitas prestasi SMA	%		0,4		0,39	0,38	0,37	0,36	0,34		2	0	4,67				512,82	0	1262,16	0	0,00	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		63,61		65,61	67,61	69,61	71,61	73,61		66,45	73,36	71,48	74,11	99,24		101,28	108,5	102,69	103,49	134,82	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		71,39		73,39	75,39	77,39	79,39	81,39		74,61	106,44	74,5	76,61	99,64		101,66	141,19	96,27	96,5	122,42	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		55,76		57,76	59,76	61,76	63,76	65,76		53,99	72,92	73,06	76,71	99,33		93,47	122,02	118,3	120,31	151,05	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		57,48		59,48	61,48	63,48	65,48	67,48		59,57	63,78	66,63	72,38	98,46		100,15	103,74	104,96	110,54	145,91	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		61,45		63,45	65,45	67,45	69,45	71,45		68,87	65,44	67,68	68,51	98,53		108,54	99,98	100,34	98,65	137,90	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		61,49		63,49	65,49	67,49	69,49	71,49		65,24	65,95	46,05	71,66	99,51		102,76	100,7	68,23	103,12	139,19	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		60,2		62,2	64,2	66,2	68,2	70,2		63,54	71,48	76,55	78,06	99,71		102,15	111,34	115,63	114,46	142,04	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		66,74		68,74	70,74	72,74	74,74	76,74		74,38	73,42	73,74	78,35	99,95		108,2	103,79	101,37	104,84	130,24	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		68,25		70,25	72,25	74,25	76,25	78,25		70,25	75,86	75,9	75,94	76,12		100	105	102,22	99,59	97,28	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		56,32		58,32	60,32	62,32	64,32	66,32		61,02	76,69	77,57	80,91	99,61		104,63	127,14	124,47	125,79	150,20	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		58,03		60,03	62,03	64,03	66,03	68,03		60,05	62,37	99,63	64,9	68,71		100,03	100,55	155,6	98,29	101,00	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		73,69		75,69	77,68	79,68	81,68	83,68		75,69	74,28	76,14	76,63	77,34		100	95,62	95,56	93,81	92,42	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		64,17		66,17	68,16	70,16	72,16	74,16		68,95	69	68,53	66,93	99,57		104,2	101,23	97,68	92,75	134,26	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%		71,94		73,94	75,94	77,94	79,94	81,94		74,04	74,77	71,6	73,78	81,06		100,14	98,46	91,87	92,29	98,93	
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		70,81		72,81	74,81	76,81	100	80,81		98,98	100	100	99,98	100		135,94	133,67	130,19	99,98	123,75	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		72,11		74,11	76,11	78,11	100	82,11		100	100	100	100	100		134,93	131,39	128,02	100	121,79	
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		68,66		70,66	72,66	74,66	100	78,66		98,84	100	100	99,98	100		139,88	137,63	133,94	99,98	127,13	
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		70,42		72,42	74,42	76,42	100	80,42		99,25	100	100	100	100		137,05	134,37	130,86	100	124,35	
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		65,69		67,69	69,69	71,69	100	75,69		97	100	100	100	99,89		143,3	143,49	139,49	100	131,97	
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		71,69		73,69	75,69	77,69	100	81,69		98,65	100	100	100	100		133,87	132,12	128,72	100	122,41	
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		71,02		73,02	75,02	77,02	100	81,02		99,05	100	100	100	100		135,65	133,3	129,84	100	123,43	
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		72,22		74,22	76,22	78,22	100	82,22		100	100	100	100	99,99		134,73	131,2	127,84	100	121,61	
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		74,95		76,95	78,95	80,95	100	84,95		99,48	100	100	100	100		129,28	126,66	123,53	100	117,72	
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		73,16		75,16	77,16	79,16	100	83,16		97,45	100	100	100	100		129,66	129,6	126,33	100	120,25	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		71,45		73,45	75,45	77,45	100	81,45		98,94	100	100	100	99,99		134,7	132,54	129,12	100	122,76	
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		68,13		70,13	72,13	74,13	100	78,13		99,27	100	100	99,95	100		141,55	138,64	134,9	99,95	127,99	
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		70,1		72,1	74,1	76,1	100	80,1		99,19	100	100	100	100		137,57	134,95	131,41	100	124,84	
	Persentase serapan kurikulum SMA	%		70,95		72,95	74,95	76,1	100	80,1		100	100	100	99,97	99,96		137,08	133,42	131,41	99,97	124,79	
	Persentase SMA memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%		20,79		49,65	56	61,78	68,13	73,9		50,81	60,37	85,71	96,62	100		102,34	107,8	138,73	141,82	135,32	
	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi manajemen pelayanan pendidikan	%		100		100	100	100	100	100		100	100	100				100	100	100	100	0,00	
B	RENSTRA PD TAHUN 2024 - 2026																						
1	TUJUAN																						
	Harapan Lama Sekolah	Tahun									12,94						12,86						99,38
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun									8,08						8,02						99,26

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka									74,57						63,17						84,71
2	SASARAN																						
	APK SMA, SMK dan SLB	%									82,92						84,08						101,40
	Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	Angka									66,08						69,72						105,51
	Nilai karakter siswa sekolah menengah	Angka									85,44						69,26						81,06
	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	Angka									70,93						71,60						100,94
	Indeks Manajemen Risiko	Angka									3,18						3,01						94,65
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka									3,20						3,31						103,44
3	PROGRAM																						
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	%									65,00						86,71						133,40

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	Angka									36,00						1,14						3,17
	Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%									67,78						74,4						109,77
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	%									50,00						11,5						23,00
	Persentase angka putus sekolah SMA	%									2,30						1,1						209,09
	Persentase angka putus sekolah SMK	%									0,03						2,69						1,12
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	%									60,00						76,63						127,72
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	Angka									0,55						1,05						190,91
	Persentase capaian prestasi	%									57,35						20,18						35,19

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	peserta didik SMK																						
	Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%									50,35						49,64						98,59
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	%									10,53						18,09						171,79
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	Angka									10,00						0,81						8,10
	Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%									10,00						24,82						248,20
	Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	%									68,18						76,92						112,82
	Persentase angka putus sekolah SLB	%									3,53						4,49						78,62

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	%									80,30						80,3						100,00
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	%									10,00						10						100,00
	Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	%									10,00						10						100,00
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	%									90,54						84,9						93,77
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	%									76,59						70,73						92,35

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	%									75,57						78,52						103,90
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	%									25,69						75,07						292,21
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	%									93,71						88,14						94,06
	APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	%									79,86						80,79						101,16
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	%									72,83						116,06						159,36
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	%									77,11						79,13						102,62
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	%									54,59						81,22						148,78
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	%									77,81						89,04						114,43
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	%									87,73						79,46						90,57
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	%									81,00						79,18						97,75
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	%									88,25						89,51						101,43

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	%									0,90						86,34						9593,33
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	%									40,11						63,25						157,69
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	%									69,80						70,41						100,87
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	%									69,80						68,32						97,88
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	%									78,70						100,99						128,32
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	%									90,00						79,82						88,69

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	%									85,55						93,09						108,81
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	%									76,12						95,54						125,51
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	%									79,00						88,14						111,57
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	%									84,74						77,01						90,88
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	%									44,94						75,32						167,60
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	%									80,00						80,54						100,68

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	%									79,00						84,91						107,48
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%									1,67						13,22						791,62
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%									1						3,74						374,00
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%									2,87						13,21						460,28
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%									1,25						1,44						115,20
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%									1,92						14,94						778,13

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%									90						6,32						7,02
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%									2,74						6,32						230,66
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%									2,2						18,68						849,09
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%									3,22						12,36						383,85
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%									28,57						5,46						19,11
	Persentase capaian prestasi peserta didik	%									3,63						2,3						63,36

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	SMA, SMK dan SLB CABDIN XI																						
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%									1,96						6,03						307,65
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%									2,52						6,61						262,30
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	Angka									89,06						88,51						99,38
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	Angka									81,22						80,12						98,65
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	Angka									83,27						82,8						99,44
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	Angka									81,77						80,96						99,01
	Nilai karakter siswa SMA,	Angka									88,34						88,19						99,83

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	SMK dan SLB CABDIN V																						
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	Angka									86,49						85,93						99,35
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	Angka									88,83						83,83						94,37
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	Angka									89,03						88,1						98,96
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	Angka									85,85						86,04						100,22
	Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	Angka									82,21						70,49						85,74
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	Angka									83,27						82,47						99,04
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	Angka									85,3						84,58						99,16
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	Angka									86,06						84,92						98,68

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%									3,00						10						333,33
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%									100,00						10,71						10,71
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%									100,00						25,81						25,81
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%									10,00						14,81						148,10
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%									20,00						83,33						416,65

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%									100,00						50						50,00
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%									100,00						100						100,00
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%									100,00						0						0,00
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%									25,00						11						44,00
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%									25,00						5,41						21,64

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%									4,76						11,76						247,06
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%									100,00						57,44						57,44
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%									100,00						22,58						22,58
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	%									15						95,65						637,67
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	%									93,93						89,74						95,54

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	%									100						50						50,00
	Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	%									76,2						76,2						100,00
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%									100						100						100,00
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%									100						100						100,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	%									100						100						100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	perangkat daerah																						
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%									100						100						100,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%									100						100						100,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%									100						100						100,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%									100						100						100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%									100						100						100,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%									100						100						100,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%									100						100						100,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%									100						100						100,00
	Persentase tingkat pelayanan umum,	%									100						100						100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah																						
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%									100						100						100,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%									100						100						100,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%									100						100						100,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%									100						100						100,00

Berdasarkan tabel 2.3, maka dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan

   Renstra 2018 - 2023

   Terdapat tiga indikator tujuan yaitu Disparitas APK SMA/SMK/SLB dan Nilai Kepuasan Masyarakat. Rasio capaian indikator Disparitas APK SMA/SMK/SLB tahun 2019 dan 2020 cukup rendah yaitu di angka 57,41 dan 56,11 serta mengalami peningkatan rasio capaian pada tahun 2021 dan 2022 yaitu di angka 80,87 dan 80,74 dan penurunan capaian di tahun 2023 menjadi 68,24 hal ini menunjukan bahwa tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan belum merata antar wilayah di Jawa Tengah, semakin besar capaian Disparitas APK maka semakin tidak meratanya persebaran penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan di suatu wilayah. Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan setiap tahun dengan capaian melebihi target.

   Renstra 2024 - 2026

   Terdapat empat indikator tujuan yaitu Harapan Lama Sekolah, Rata – Rata Lama Sekolah, Indeks Reformasi Birokrasi. Tahun 2024 capaian HLS sebesar 99,38 dan RLS sebesar 99,26 meskipun tidak mencapai target tahunan namun mengalami peningkatan capaian dari tahun sebelumnya. Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian sebesar 84,71%, indeks reformasi birokrasi Dinas Pendidikan belum tercapai salah satunya yaitu dikarenakan belum menyusun rencana tindak Agen Perubahan dan melaksanakan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 serta belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik serta pelaksanaan keterbukaan informasi publik

2. Indikator Sasaran

   Renstra 2018 - 2023

   Terdapat tujuh indikator yaitu Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB, Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi Kualifikasi Akademik, APK SMA/SMK/SLB, Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Capaian indikator sasaran diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Indikator APK SMA/SMK/SLB pada tahun 2019 dan 2020 telah mencapai target, sedangkan capaian tahun 2021 – 2023 belum mencapai target dikarenakan masih terdapat anak usia sekolah pada daerah tertentu bersekolah di luar wilayah kabupaten/kota karena mengkuti kepindahan orang tua bekerja Anak usia sekolah menengah bersekolah di madrasah atau mengikuti program kejar paket C .
b. Presentase sarpras sesuai standar pada tahun 2019 – 2020 dengan tingkat capaianya cenderung mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2021 indikator ini tidak tercapai dikarenakan terdapat beberapa sarpras yang belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), meliputi ruang kelas, perpustakaan, sanitasi, laboratorium dan bengkel. hal ini karena anggaran lebih difokuskan pada penanganan covid-19. Sedangkan capaian di tahun 2022 dan 2023 tercapai , hal ini dikaranakan dukungan anggaran untuk peningkatan sarpras di dapat melalui dana APBN dan APBD.
c. Persentase guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi akademis pada tahun 2019 – 2023 tercapai hal ini dikarenakan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kompetensi guru di antaranya yaitu melalui kegiatan TOT dan beberapa kegiatan pengembangan karir lainya.
d. Rasio guru terhadap Rombongan belajar pada SMA/SMK/SLB dari tahun 2019 – 2023 inidkator ini sealalu tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, adapun program kegiatan yang telah dilakukan antara lain dengan melakukan pemetaan dan pendistribusian guru sesusi dengan jam mengajar serta sesuai dengan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.
e. Nilai Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 – 2020 tercapai dengan tingkat capainya juga mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2021 indikator ini tidak tercapai dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 sehingga pelayanan yang dilakukan kurang maksimal meskipun Dinas Pendidikan juga telah melalakukan berbagai inovasi untuk pelayanan secara online. Sedangkan capaian di tahun 2022 dan 2023 indikator ini tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
f. Nilai SAKIP perangkat daerah pada tahun 2019 -2022 indikator ini belum mencapai target hal ini dikarenakan terjadi perubahan indikator penilaian SAKIP dari taun sebelumnya sehingga capainya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2023 indikator nilai SAKIP perangkat daerah telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 101,73% . Adapun hal yang telah dilakukan oleh

Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP adalah dengan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan di tahun sebelumnya

Renstra 2024 - 2026

Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026 ada 8 dengan jumlah indikator sasaran yaitu sebanyak 9 indikator kinerja. Capaian indikator sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Persentase karya budaya berperingkat nasional dengan capaian sebesar 110,89% dikarenakan adanya kenaikan jumlah arisan budaya tak benda yang ditetapkan nasional;
b. Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan dengan capaian kinerja sebesar 104,5%
c. APK SMA, SMK, SLB dengan capaian kinerja sebesar 101,4% adapun hal – hal yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yaitu melalui pemberian pembiayaan Pendidikan yang terjangkau, peningkatan sarpras Pendidikan, serta pemetaan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan;
d. Nilai karakter siswa dengan capaian kinerja sebesar 81,06% salah satu faktornya yaitu masih rendahnya Sistem pelayanan pendampingan kejadian terkait inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap gender, fisik, agama, suku, dan budaya masih rendah;
e. Rata – rata literasi dan numerasi sekolah menengah dengan capaian kinerja sebesar 105,51% dikarenakan meningkatnya kualitas pembelajaran siswa, Adapun intervensi kegiatan yang telah dilakukan antara lain dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta pembiayaan yang terjangkau (pembiayaan Pendidikan bebas pungutan) sehingga siswa lebih focus dalam proses belajar;
f. Angka Partisipasi sekolah usia 16 – 18 th dengan capaian kinerja sebesar 100,94% dikarenakan adanya kebijakan – kebijakan terkait pembiayaan Pendidikan sehingga partisipasi Masyarakat untuk mengenyam Pendidikan meningkat;
g. Indeks Manajemen Risiko dengan capaian kinerja sebesar 94,71% belum tercapai salah satu factor yang mempengaruhi antara lain belum teridentifikasinya resiko strategis terkait dengan pemertaan akses Pendidikan salah satunya yaitu relokasi/mutase guru PPPK;

h. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 103,44% telah tercapai dikarenakan pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

3. Indikator Program

Renstra 2018 - 2023

Terdapat 201 indikator yang terdiri dari :

a) 17 indikator Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian sama dengan target;
b) Satu indikator Persentase Ketercapian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD dengan capaian sama dengan target;
c) 14 indikator APK SLB dengan capaian 12 indikator capaian diatas target, dan 2 indikator dibawah target;
d) 14 indikator Disparitas Prestasi SLB;
e) 14 indikator Persentase Prasarana Sarana SLB sesuai Standar dengan capaian 13 indikator capaian diatas target, dan 1 indikator dibawah target;
f) 14 indikator Persentase Serapan Kurikulum SLB dengan capaian diatas target;
g) 14 indikator APK SMK dengan capaian 11 indikator diatas target, dan 3 indikator dibawah taregt;
h) 14 indikator Disparitas Prestasi SMK;
i) 14 indikator Persentase Prasarana Sarana SMK sesuai Standar dengan capaian diatas target;
j) 14 indikator Persentase Serapan Kurikulum SMK dengan capaian diatas target;
k) Satu indikator Persentase SMK memanfaatkan Sumber Belajar Berbasis IT dengan capaian diatas target;
l) Satu indikator Persentase Guru SLB memenuhi Kualifikasi Akademik dengan capaian diatas target;
m) Satu indikator Persentase Guru SMA memenuhi Kualifikasi Akademik dengan capaian diatas target;
n) Satu indikator Persentase Guru SMK memenuhi Kualifikasi Akademik dengan capaian diatas target;
o) Satu indikator Rasio Guru SLB dengan Rombongan Belajar SLB dengan capaian diatas target;
p) Satu indikator Rasio Guru SMA dengan Rombongan Belajar SMA dengan capaian diatas target;

q) Satu indikator Rasio Guru SMK dengan Rombongan Belajar SMK dengan capaian diatas target;
r) 14 indikator APK SMA dengan capaian 11 indikator diatas target, dan 3 indikator dibawah target;
s) 14 indikator Disparitas Prestasi SMA;
t) 14 indikator Persentase Prasarana Sarana SMA sesuai Standar dengan capaian 7 indikator diatas target, dan 7 indikator dibawah target;
u) 14 indikator Persentase Serapan Kurikulum SMA dengan capaian 10 indikator diatas target, dan 4 indikator dibawah target;
v) Satu indikator Persentase SMA memanfaatkan Sumber Belajar Berbasis IT dengan capaian diatas target;
w) Satu indikator Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan capaian diatas target;
x) Satu indikator Persentase Jenis Budaya terlayani dengan capaian diatas target;
y) Satu indikator Persentase Seni Budaya Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dengan capaian diatas target;
z) Satu indikator Persentase Siswa dan Anggota Paguyuban Penghayat Kepercayaan yang terlayani dengan capaian diatas target;
aa) Satu indikator Persentase Status Cagar Budaya dengan capaian diatas target;
bb) Satu indikator Persentase Sumber Belajar Bebasis Budaya; dan Survei Kepuasan Pengunjung Museum dengan capaian diatas target.

Renstra 2024 - 2026

Indikator Program sesuai dengan Resngtra 2024 – 2026 sebanyak 112 indikator yang terdiri dari 87 indikator program pada urusan Pendidikan dan 16 indikator program pada urusan penunjang pemerintah daerah provinsi. Pada tahun 2024 tingkat capaian indicator urusan Pendidikan sebanyak 47 indikator sudah mencapai target sedangkan 40 indikator belum tercapai Adapun indictor yang belum tercapai sebagai berikut : Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA, Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, Persentase angka putus sekolah SMK, Persentase capaian prestasi peserta didik SMK, Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum, Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB, Persentase angka putus sekolah SLB, APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I, APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II, Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV, APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V, Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB

CABDIN VI, Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI, Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X, Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X, APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI, Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI, APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII, Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I , II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK, Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus, Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II, Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III, Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI, Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII, Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX, Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X, Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII, Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII.

Berdasarkan capaian di atas adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak tercapaian kinerja sebagai berikut :

Faktor Keberhasilan capaian kinerja :

1. Dukungan kebijakan pemerintah yang telah memfokuskan prioritas pembangunan untuk pendidikan utamanya terkait dengan perluasana akses layanan pendidikan baik melalui pembangunan dan pemeliharaan sarpras, pembiayaan pendidikan gartis melalui pemberian BOP, BOSDA, BSM (Beasiswa Siswa Miskin), Bantuan Seragam Siswa Miskin
2. Peran lintas sektoral dalam rangka perluasan akses utamanya dalam rangka pembangunan USB, dari pihak Kabupaten / Kota bertugas sebagai penyedia lahan dan kajian sedangkan pihak Provinsi untuk menyediakan unit sekolah baru di wilayah – wilayah blank spot.

Faktor Ketidak tercapaian capaian kinerja :

1. Masih terdapat anak putus sekolah yang berasal dari berbagai faktor sehingga perlu berkoordinasi dengan berbagai lintas sektoral dalam rangka penanganan anak putus sekolah;

2. Kualitas data yang kurang updating sehingga dalam penagmbilan keputusan dalam rangka perencanaan masih kurang optimal

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan	6.500.000	6.500.000	6.500.000	7.475.000	7.480.000	5.104.331	2.662.500	4.800.000	7.475.000	7.480.000	1.766.860	3.841.000	3.538.933	7.475.000	6.144.889	34,61	144,26	73,73	100	82,15	9,31	49,56
2	Belanja	2.163.575.647	2.192.676.867	2.232.491.514	2.275.412.801	8.734.458.288	2.500.492.821	11.550.369.481	7.574.140.846	8.125.109.235	8.616.690.782	2.497.631.036	11.287.943.420	7.194.768.338	8.125.109.235	8.495.470.197	99,89	97,73	94,99	100	98,59	48,92	48,03
3	Pembiayaan																						

Berdasarkan tabel 2.4 maka dapat diketahui dari segi anggaran selama 5 tahun, pendapatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan rata – rata sebesar 9,31% hal ini dikarenakan sumber pendapatan bertambah dari perolehan usaha mandiri satuan pendidikan dan pendapatan dari kantin sekolah. Sedangkan jika dilihat dari pertumbuhan realisasi pendapatan dengan angka 49,56%. Dari mulai tahun 2020 – 2024 realisasi paling rendah terjadi di tahun 2020 hal ini dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan dari kantin sekolah mengalami penurunan dikarenakan pembelajaran dilakukan secara daring karena adanya wabah virus corona.

Sedangkan untuk belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga mengalami rata – rata kenaikan sebesar 48,92%. Kenaikan ini dikarenakan anggaran berfokus pada prioritas pendidikan seperti DAK Fisik dan Non Fisik, pembiayaan pendidikan (BOS, BOSDA, BOP), bantuan pendidikan (hibah) serta pembangunan sarpras pendidikan. Rata – rata realisai belanja sebesar 48,03% hal ini dikarenakan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Pendidikan merupakan proses kreatif yang tak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi dari keping uang yang sama, hal ini dikarenakan bahwa apa yang diajarkan dalam proses pendidikan, sedangkan pendidikan itu sendiri adalah proses pembudayaan. Proses pendidikan sebagai proses pembudayaan harus mampu menghubungkan kapasitas moral individual ke dalam kehidupan kolektif sebagai warga komunitas, bangsa, dan dunia. Untuk itu, selain diperlukan pendikan moral personal yang biasanya diajarkan lewat pendidikan agama dan filsafat moral, juga perlu pendidikan kewargaan dalam konteks kemajemukan sosial, yang memberikan wahana kepada siswa suatu pengalaman terstuktur untuk menghubungkan moral *judgment* dan moral *situations* yang dihadapinya, serta kesanggunggupan untuk menghadapi aneka perbedaan dengan semangat kekeluargaan.

Pendidikan sebagai transformasi budaya dapat dikatakan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Pendidikan justru mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk hari esok dan mentransformasikan nilai budaya sehingga dapat membentuk karakter. Nilai penting pendidikan berbasis budaya adalah dapat diibaratkan sebagai tameng dan senjata bagi individu yang hidup di jaman informasi dan teknologi ini. Dengan pendidikan berbasis budaya ini, individu maupun masyarakat dapat mengenal identitas budaya sendiri, sehingga selanjutnya dapat memetakan antara hal-hal baru yang boleh diterima dan harus ditolak.

Tantangan dan peluang dalam pendidikan diantaranya :

1. Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan suatu tantangan atas peluang yang sangat menjanjikan jika mampu dimanfaatkan dengan optimal. Pada kondisi dimana penduduk dengan usia produktif yang sangat besar, sementara pada sisi lain jumlah usia muda semakin kecil, dan penduduk usia lanjut dengan populasi yang belum terlalu besar. Bonus demografi akan diikuti dengan dampak sosial maupun ekonomi yang salah satunya merupakan dampak utama yakni angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah. Jumlah penduduk usia kerja yang melimpah pada kurun waktu terjadinya bonus demografi (2020-2030) sangat potensial memberikan dampak positif sebagai modal pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya hasil ini mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan secara lebih luas.

Uraian tersebut di atas akan menjadi terbalik dan merupakan bencana bagi negara manakala bonus demografi tidak mampu dimanfaatkan sebagai peluang, karena jumlah penduduk yang besar dan dalam usia produktif namun tidak mampu terserap dalam dunia kerja akibat terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya kompetensi. Hal yang paling utama harus dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi tersebut adalah memberdayakan semua potensi yang ada, mempersiapkan rencana pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja guna menampung penduduk usia produktif pada saat terjadinya bonus demografi tersebut.

Guna menyonsong terjadinya bonus demografi tersebut, pendidikan menjadi sangat prioritas untuk menjadi garapan utama guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Kegagalan menyiapkan sumber daya yang unggul akan berakibat munculnya musibah pada situasi yang seharusnya menjadi berkah. Bonus demografi yang diperkirakan akan tersedianya jumlah penduduk usia produktif dan diperkirakan sebesar 70 % dari jumlah penduduk usia produktif di tahun 2020-2030 harus disikapi sebagai sebuah peluang emas untuk menjadikan negara ini mampu menjadi kekuatan ekonomi, dan hal yang harus dipersiapkan adalah penyediaan lapangan kerja dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kata kunci untuk menyambut bonus demografi dengan kesadaran bahwa pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang dan sebagai instrumen utama kemajuan bangsa harus menjadi prioritas pembangunan.

2. Pendidikan Era Revolusi Industri

Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Revolusi industri ini pun sedang berjalan dari masa ke masa. Dekade terakhir ini sudah dapat disebut memasuki fase keempat 4.0 menghadirkan digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet dengan manufaktur. Era pendidikan 4.0 merupakan tantangan yang sangat berat dihadapi guru. Jika tidak mengubah cara mendidik dan belajar-mengajar, maka 30 tahun mendatang kita akan mengalami kesulitan besar. Era Revolusi Industri 4.0 membawa dampak yang tidak sederhana. Termasuk dalam hal ini adalah pendidikan. Era ini ditandai dengan semakin sentralnya peran teknologi *cyber* dalam kehidupan manusia. Maka tak heran jika dalam dunia pendidikan muncul istilah "Pendidikan 4.0".

Pendidikan 4.0 (*Education* 4.0) adalah istilah umum digunakan oleh para ahli pendidikan untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi *cyber* baik secara fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran. Pendidikan 4.0 adalah fenomena yang merespons kebutuhan munculnya revolusi industri

keempat dimana manusia dan mesin diselaraskan untuk mendapatkan solusi, memecahkan masalah dan tentu saja menemukan kemungkinan inovasi baru. Prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri, dari sinilah kita harus melakukan penyesuaian kurikulum yang ada pada dunia pendidikan sehingga lulusan dengan mudah menyesuaikan ketika bekerja/melanjutkan.

Kesuksesan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 erat kaitannya dengan inovasi yang diciptakan oleh sumberdaya yang berkualitas, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah wajib dapat menjawab tantangan dalam mengahadapi kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja di era globalisasi. Pendidikan 4.0 sangat berperan dalam membangun pendidikan nasional, hal ini dikarenakan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, dimana melakukan langkah-langkah penguatan Tri Pusat Pendidikan yakni keluarga, masyarakat dan sekolah atau lembaga pendidikan supaya terwujudnya sebuah ekosistem pendidikan yang baik. Selain itu, nilai-nilai budaya menjadi kompetensi unggulan yang mengacu pada tatanan nilai dan memperkuat jati diri budaya bangsa.

3. Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya

Masyarakat harus sadar akan identitas dirinya melalui penghayatan dan pengamalan kebudayaan. Tanpa kesadaran jati diri, individu akan terombang-ambing dalam arus globalisasi yang dahsyat dengan gelombang informasinya yang tak terbendung. Pada titik inilah, upaya transformasi nilai-nilai kebudayaan menjadi niscaya, sehingga media pendidikan harus ditempatkan pada posisi yang prioritas. Tujuan utama dari pendidikan itu sendiri diarahkan supaya individu mampu memaknai dirinya, lingkungannya, dan masyarakatnya. Kemampuan memberi makna adalah indikasi adanya kesadaran akan identitas diri. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas generasi muda dalam berbagai aspek kehidupan dan dapat mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan akan terlihat dampaknya dalam waktu yang relatif lama, tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat.

Rancangan kurikulum dan metode pendidikan pun harus dapat menyesuaikan dengan kondisi yang terus berkembang dan semakin kompetitif mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Perubahan yang terjadi dalam era revolusi industri juga sangat berpengaruh pada karakter manusia. Menurut

Koesoema (2011: 193) pendidikan karakter di sekolah secara sederhana bisa didefinisikan sebagai, "pemahaman, perawatan, dan pelaksanaan keutamaan (*practice of virtue*)". Oleh karena itu pendidikan di sekolah mengacu pada proses penanaman nilai, berupa pemahaman, tata cara merawat dan menghidupi nilai-nilai itu, serta bagaimana peserta didik memiliki kesempatan untuk dapat melatihkan nilai-nilai tersebut secara nyata.

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan menentukan pendirian dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap dan berbuat. Ketiga proses tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.

Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis serta untuk bersosialiasi dengan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya. Dengan demikian, semakin banyak orang yang berpendidikan diharapkan akan lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional.

Pendidikan nasional memerlukan dukungan yang kondusif untuk itu. Untuk kepentingan tersebut diperlukan manusia-manusia bermutu sebagai hasil dari Pendidikan, memposisikan Pendidikan 4.0 sebagai tantangan, harapan dan peluang dimana harus mampu mempersiapkan diri dengan mengembangkan dan membangun potensi berupa penanaman nilai-nilai budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Peran pendidikan sebagai transmisi kebudayaan harus mampu mencetak tenaga pendidikan yang melek akan pendidikan 4.0. Instansi pendidikan dalam hal ini sekolah berperan penting dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada pelajar dan mahasiswa. Tenaga pendidik dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menghadapi genereasi milenial yang mudah mengakses data digital.

Berdasarkan tantangan di atas permasalahan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

a. Pemerataan Akses Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor kuat dalam membentuk masa depan bangsa yang cerah dan berkelanjutan. Pasal 31 undang-undang dasar negara Republik Indonesia sangat menekankan pentingnya setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran. Bahkan lebih spesifik pada ayat 3 dan 4 ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan memberikan akses yang merata dan berkualitas, pendidikan dapat menjadi alat untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memperluas kesempatan bagi kelompok yang terpinggirkan serta memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Bahkan dalam konteks global, pendidikan mengemban peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kondisi pendidikan di Jawa Tengah belum merata hal ini dibuktikan masih terdapat wilayah kecamatan yang belum mempunyai SMA/SMK. Dibutuhkan kebijakan yang benar – benar tegas terkait Pembangunan USB, Pembangunan USB seharusnya diarahkan untuk mengakomodir kabupaten / kota yang memang masuk kategori blank spot. Selain ketersediaan sekolah baru yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah dari ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan merupakan komponen penting bagi terselenggaranya proses pembelajaran. Kondisi faktual menunjukkan belum seluruh SMA, SMK SLN Negeri di Jawa Tengah telah memenuhi SNP. Beberapa sekolah karena faktor usia teknis bangunan mengalami kerusakan dan membutuhkan pembaharuan/rehab sarana dasar. Disisi lain terdapat sekolah yang belum memiliki sarana prasarana penunjang sesuai SNP (laboratorium, ruang praktek siswa, ruang sanitasi, UKS, ruang guru, alat praktek/pembelajaran), status lahan sekolah SMA, SMK dan SLB yang masih belum menjadi aset provinsi teridentifikasi diantaranya masih terdapat SMA, SMK, SLB Negeri menempati lahan yang menjadi kepemilikan pihak lain, belum tertampungnya seluruhnya lulusan SMP pada satuan pendidikan menengah dalam zonasi pendidikan, dan belum meratanya ketersediaan layanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Sehingga perlu pembangunan/ rehab sarana dasar dan penunjang pendidikan. Kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik yang pada

giliranya berdampak pada pencapaian standar kompetensi lulusan. Karenanya, dibutuhkan kebijakan inovatif yang berdampak pada kebutuhan anggaran untuk penyelesaian permasalahan sarana dan prasarana pendidikan baik dasar maupun penunjang.

Selain dari sisi sarana dan prasarana permasalahan terkait pemertaan juga terjadi dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia pada satuan pendidikan yang memiliki peran dan tugas saling melengkapi proses pembelajaran pendidikan. Namun demikian, realitas yang dihadapi seluruh satuan pendidikan SMA, SMK, SLB di Jawa Tengah jumlah pendidik dalam memenuhi standar jam belajar pada kurikulum yang ditetapkan belum optimal, meskipun sudah dilakukan rekruitmen dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Demikian halnya dengan tenaga kependidikan sebagai penunjang layanan pendidikan satuan pendidikan. Adapun permasalahan terkait dengan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan sebagi berikut :

1) Rasio pendidik dengan siswa pada SMA, SMK, SLB Negeri belum ideal, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya pemenuhan SPM. Kondisi ini disebabkan karena belum meratanya penempatan pendidik pasca P3K, serta belum diperhitungkan pendidik yang memasuki masa pensiun;
2) Belum tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK) disetiap satuan pendidikan SMA dan SMK demi mewujudkan pendidikan yang ramah dan adaptif terhadap bagi penyandang disabilitas.

b. Pemerataan Mutu Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang disepakati menjadi hal pokok dalam suatu bangsa. Kualitas Pendidikan dalam suatu bangsa menjadi suatu hal yang penting dan sebagai salah satu penentu kemajuan bangsa. Dengan kata lain kemajuan suatu bangsa atau negara di lihat dari kualitas Pendidikan di suatu negara tersebut. Permasalahan Pendidikan di Jawa Tengah dalam mewujudkan Pendidikan berkualitas antara lain :

Kurikulum

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan maupun pengaruh isu global yang berkembang serta tantangan millenial, maka kurikulum harus bersifat dinamis. Berdasar tuntutan di atas, pemerintah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan, mengembangkan,

mengkreasi, memperkaya dan memperkuat keterlaksanaan kurikulum. Dengan demikian dipahami interaksi sumber daya sekolah meliputi ketersediaan dan mutu guru sebagai implementator kurikulum, ketersediaan dan kesiapan sarana prasarana pendidikan menempati posisi strategis bagi peningkatan mutu proses dan lulusan pendidikan.

Adanya program Sekolah Unggulan, yaitu Sekolah dengan keunggulan spesifik berbasis potensi dan kearifan lokal yang menghasilkan lulusan dengan value/nilai kebermanfaatan bagi Masyarakat, dapat memberikan angin segar dalam peningkatan mutu Pendidikan di Jawa Tengah.

Sekolah unggulan diharapkan akan membentuk pembelajaran yang lebih inovatif yaitu dengan menerapkan kurikulum yang sesuai dengan keunggulan masing – masing satuan Pendidikan. Selain itu peningkatan mutu Pendidikan juga tidak jauh dari permasalahan karakter. Penerapan nilai kaakter yang terimplementasikan dalam kurikulum menjadi hal yang penting .

Sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang kurikulum pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, bahwa kokurikuler yang dilaksanakan pada satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplain ilmu yang dit implementasikan kedalam gerakan 7 (tujuh) kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Adapun gerakan 7 (tujuh) kebiasaan anak Indonesia hebat dirumuskan untuk memperkuat 8 (delapan) dimensi profil kelulusan antara lain :

- Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Kewargaan
- Penalaran kritis
- Kreativitas
- Kolaborasi
- Kemandirian
- Kesehatan
- Komunikasi

Gerakan 7 (tujuh) kebiasaan anak Indonesia hebat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, serta mengembangkan keterampilan. Melalui gerakan ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari secara

mendalam tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Gerakan ini melatih peserta didik untuk melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar mereka. Projek penguatan ini juga diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

c. Tata Kelola Pendidikan

Kelembagaan berkait dengan kedudukan dan status serta kapasitas Dinas Pendidikan serta satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan pembelajaran kepada peserta didik. Dalam koridor kelembagaan pada Dinas Pendidikan terdapat permasalahan institusional yang berpotensi menjadi masalah pada penyelenggaraan layanan pendidikan kedepan yaitu :

1) Belum optimalnya kapasitas organisasi dan tatalaksana layanan pendidikan mengingat luas wilayah dan rentang kendali satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Jawa Tengah;
2) Belum optimalnya fungsi organisasi dan tatalaksana dalam mengantisipasi dinamika perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan, penambahan jumlah cabang dinas dan kedudukan serta pola hubungan dengan satuan pendidikan.

Permasalahan tersebut di atas berpotensi menimbulkan masalah baru pada pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan pendidikan.

Kelembagaan satuan pendidikan dihadapkan pada realitas kondisi kelembagaan SMA, SMK dan SLB yang membutuhkan perhatian, diantaranya :

1) Masih terdapat satuan pendidikan menengah dan khusus yang belum memenuhi standar nasional pendidikan dibeberapa wilayah kabupaten di Jawa Tengah yang berdampak pada kurang optimalnya layanan pendidikan;
2) Belum meratanya peringkat akreditasi satuan pendidikan menengah dan diksus antar wilayah di Jawa Tengah;
3) Masih terdapat satuan pendidikan yang dikelola masyarakat belum memiliki ijin operasional tetapi sudah melaksanakan layanan pendidikan.

Kondisi kelembagaan pada institusi dinas pendidikan maupun satuan pendidikan tersebut di atas pasti berpengaruh terhadap kualitas layanan

pendidikan kepada peserta didik yang berdampak pada kualitas kompetensi lulusan.

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
A	**Akses layanan pendidikan menengah dan khusus belum optimal**	1) Distribusi pemerataan layanan pendidikan belum optimal	a) Identifikasi pemetaan Guru belum optimal. b) Kurangnya sinergitas kebijakan penataan Guru antara Pemerintah Pusat-Daerah. c) Pengawasan dan pengendalian dalam ijin penyelenggaraan pendidikan masih lemah. d) Perencanaan dan penyusunan kebijakan pendidikan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan. e) Belum optimalnya peran Cabang Dinas Pendidikan dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
		2) Keterjangkauan layanan pendidikan belum optimal	a) Masih terdapat wilayah *blankspot* layanan pendidikan di tingkat kecamatan. b) Keterbatasan fiskal daerah dalam penyediaan Unit Sekolah baru (USB). c) Kurang sinkronnya kebijakan politis dan teknokratis. d) Masih terdapat biaya personil pendidikan. e) Pemanfaatan dana transfer (DAK Fisik) belum optimal. f) Belum optimalnya koordinasi pembangunan pendidikan dengan Pemerintah Kab/Kota. g) Belum optimalnya kerjasama pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam layanan pendidikan
B	**Mutu pendidikan belum memadai**	1) Kualitas sarpras pendidikan belum memadai	a) Perencanaan yang kurang memadai termasuk identifikasi pemetaan dan pendataan sarpras pendidikan. b) Masih terdapat sarpras pendidikan dalam kondisi rusak ringan, sedang dan berat. c) Kapasitas fiskal daerah untuk pemenuhan sarpras pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) belum sepenuhnya mencukupi. d) Kesadaran dan upaya pemeliharaan sarpras pendidikan belum maksimal terutama oleh warga sekolah.
		2) Kualitas Guru belum optimal	a) Masih terdapat Guru SMA, SMK dan SLB belum berkualifikasi S1/D4 b) Masih banyak Guru SMA, SMK dan SLB belum tersertifikasi pendidik. c) Masih kurangnya ketrampilan Guru dalam pengembangan dan pemanfaatan media ajar berbasis IT.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			d) Kemampuan Guru dalam mengembangkan kurikulum ajar masih belum memadai terutama dalam mengintegrasikan muatan lokal ke dalam materi pelajaran. e) Belum seluruh Guru melakukan refleksi pembelajaran.
		3) Pendidikan karakter belum optimal	a) Kemampuan/kapasitas Guru dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, *bullying* dan diskriminasi dalam satuan pendidikan masih kurang. b) Kapasitas Guru dalam pendidikan karakter termasuk dalam penanganan siswa inklusi masih kurang, terkesan hanya menjadi tugas tanggung jawab Guru BK saja.
		4) Tata kelola pendidikan belum optimal	a) Kapasitas Kepala Sekolah dalam perencanaan, manajerial dan pengelolaan satuan pendidikan masih kurang. b) Budaya refleksi dan perbaikan pembelajaran belum optimal. c) Pengelolaan dan Pemanfaatan dana BOS kurang optimal. d) Perencanaan sekolah belum sepenuhnya berbasis data dan hasil evaluasi. e) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran sekolah. f) Penyusunan RKA dan RKAS belum optimal. g) Koordinasi dan Kerjasama multipihak dan lintas sektor masih kurang. h) Komitmen dan integritas pelaku pendidikan belum maksimal.
C	**Relevansi pendidikan masih kurang**	Kompetensi lulusan belum selaras dengan kebutuhan dunia kerja.	a) Kualitas fasilitas pembelajaran belum memadai. b) Alat praktik dan peraga pembelajaran belum sesuai dengan dunia kerja. c) Masih terdapat Guru SMK belum memiliki kompetensi keahlian. d) Identifikasi Bidang/Program Keahlian SMK dengan kebutuhan kerja masih kurang, sehingga banyak ditemukan bidang/program keahlian di SMK jenuh atau kurang peminat.

2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berbagai isu strategis global, nasional, maupun daerah yang tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah lima tahun ke depan. Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka isu strategis daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah lima tahun ke depan sebagai berikut.

Tabel 2.6

Perumusan Isu Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Jumlah penduduk usia produktif 2. Kebijakan daerah yang mendukung wajib belajar 13 tahun 3. Ketersediaan guru dengan kualifikasi minimal S1/D4. 4. Kekayaan Budaya, Potensi dan Kearifan local yang mendukung karakter bangsa	• Akses layanan pendidikan menengah dan khusus belum optimal • Mutu pendidikan belum memadai • Relevansi pendidikan masih kurang	1. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata 2. Risiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim yang Meningkat	1. Perubahan Iklim. 2. Ketahanan Pangan 3. Konflik sosial dan ekonomi 4. Kesehatan 5. Penuaan populasi 6. Artificial Intelligent dan Big Data	1. Kemiskinan 2. Pendidikan 3. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	1. Kemiskinan 2. Pendidikan 3. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	1. Pemerataan akses layanan pendidikan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. 2. Peningkatan mutu pendidikan berwawasan pembangunan berkelanjutan. 3. Pendidikan karakter berbasis nilai agama, budaya dan berwawasan pembangunan berkelanjutan 4. Tata kelola pendidikan berorientasi hasil dan mutu, berbasis data dan evaluasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari tujuan sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dan sasaran tersebut diimplementasikan dalam program/kegiatan dengan tetap memperhatikan isu strategis, pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah dan nasional. Adapun tujuan dan sasaran dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Dinas Pendidikan

Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis

b. Sasaran Dinas Pendidikan

Sasaran Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus;
2. Meningkatnya Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus;
3. Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;
5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua												
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,85	12,86	12,97	13,03	13,09	13,15	13,21	13,29	13,29
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus											
			Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk literasi dan numerasi	%	35,79	61,09	62,95	64,95	66,95	68,45	69,95	70,95	70,95
		Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan											
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	92,52	89,88	90,38	90,88	91,38	91,88	92,38	92,88	92,88
		Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus											
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun	%	70,81	71,6	72,24	72,88	73,53	74,16	74,8	75,45	75,45

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	%	N/A	56,7	65,36	74,02	75,11	76,2	77,29	78,38	78,38
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pendidikan												
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	Angka	73,57	55,95	65,01	70,12	72,11	74,01	76,51	80,1	80,1
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan											
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	Angka	N/A	3,37	3,31	3,35	3,39	3,4	3,45	3,5	3,5
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan											
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	Angka	3,1	3,013	3,1	3,15	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan rumusan strategi yang merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dicapai. Berikut strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus	1. Peningkatan ketersediaan lyanan pendidikan	1.1. Pemetaan kebutuhan layanan pendidikan. 1.2. Penyediaan unit layanan pendidikan SMA, SMK dan SLB. 1.3. Penguatan kerjasama / kemitraan dengan sekolah swasta. 1.4. Pengembangan layanan pendidikan berbasis teknologi informasi mendasarkan zonasi. 1.5. Perluasan layanan melalui program inklusi atau sekolah jarak jauh.
		2. Peningkatan keterjangkauan pembiayaan pendidikan	2.1. Evaluasi dan perluasan program bantuan pendidikan. 2.2. Penguatan pembiayaan pendidikan yang lebih efektif dengan akurasi data pendidikan. 2.3. Penguatan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa secara tepat sasaran. 2.4. Inovasi skema pembiayaan berbasis kinerja dan crowdfunding pendidikan, komite, alumni. 2.5. Perluasan bantuan pendidikan termasuk pendidikan tinggi. 2.6. Pembiayaan pendidikan dengan creative financing dan penguatan integrasi lintas sektor. 2.7. Penguatan beasiswa afirmasi, beasiswa vokasi berbasis kemitraan. 2.8. Pemantapan SMK berbasis kewirausahaan. 2.9. Penguatan beasiswa berprestasi orientasi nasional dan global.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Peningkatan distribusi pemerataan akses	3.1. Identifikasi pemetaan kesenjangan akses (kebutuhan). 3.2. Penataan data pendidikan. 3.3. Penyusunan data spasial pendidikan. 3.4. Penguatan pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS). 3.5. Evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). 3.6. Pengembangan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). 3.7. Redistribusi Guru melalui program rekruitmen khusus. 3.8. Pemanfaatan teknologi, khususnya pada wilayah yang masih kekurangan guru dan blankspot unit layanan pendidikan. 3.9. Pengembangan SIstem Digital Monitoring dan Pelaporan agara distribusi guru dan sarpras dan bantuan pendidikan dapat dipantau secara *real time*.
	Meningkatnya Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1.1. Peningkatan kompetensi Guru SMA, SMK dan SLB. 1.2. Penerapan pembelajaran berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics*). 1.3. Penguatan komunitas belajar professional. 1.4. Penetapan SMK Unggulan berbasis agribisnis, pertanian, kewirausahaan pangan local, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, layanan pariwisata dan perbankan syariah, agroteknologi, energi dan pertambangan, teknologi konstruksi dan rekayasa, TIK, bisnis dan manajemen berbasis ekonomi dan industri hijau. 1.5. Penetapan SMK Unggulan berorientasi nasional dan global. 1.6. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK selaras dengan DUDI. 1.7. Integrasi isu pangan, pertanian, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan syarih serta ramah lingkungan berbasis project based learning inovatif, integratif dan kolaboratif dalam kurikulum muatan local SMA dan SLB. 1.8. Penguatan pendidikan karakter dan inklusi. 1.9. Peningkatan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan *bullying*. 1.10. Evaluasi sistem asesmen mutu.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			1.11. Integrasi platform mutu pendidikan 1.12. Penguatan kreativitas dan inovasi berbasis ramah lingkungan bagi siswa SMA,SMK dan SLB. 1.13. Penguatan kemitraan DUDI bidang agritech, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian, 1.14. Pengembangan kemitraan DUDI melalui penyusunan *Memorandum of Agreement* (MoA) untuk kegiatan spesifik antara lain dengan perusahaan atau hotel syariah, restoran halal, biro perjalanan haji-umrah, bank syariah, UMKM kriya lokal, desa wisata halal, termasuk dukungan program magang dan sertifikasi halal.
		2. Peningkatan tata kelola pendidikan	2.1. Audit tata kelola internal. 2.2. Implementasi supervisi berbasis digital. 2.3. Integrasi sistem keuangan dan akuntabilitas. 2.4. Penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan dan hasil evaluasi. 2.5. Penguatan pemantauan perizinan penyelenggaraan pendidikan. 2.6. Evaluasi SMK Boarding dan Semi Boarding. 2.7. Penerapan manajemen berbasis sekolah. 2.8. Digitalisasi pelaporan dan monitoring kinerja secara berjenjang. 2.9. Penguatan pengawasan dan reward kinerja. 2.10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraaan pendidikan melalui dashboard public. 2.11. Mapping potensi dan kebutuhan DUDI serta sinkronisasi kompetensi dengan pelibatan TKDV.
	Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan	1. Peningkatan sarpras SMK sesuai dengan DUDI	1.1. Pemetaan dan analisis kebutuhan industry. 1.2. Standarisasi dan penerapan audit sarpras SMK. 1.3. Revitalisasi ruang praktik dan *teaching factory* terutama pada SMK bidang keahlian agribisnis, pertanian dan pangan, layanan pariwisata, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, dan perbankan syariah, agroteknologi, energi dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pertambangan, teknologi konstruksi dan rekayasa, TIK, serta bisnis dan manajemen berbasis ekonomi dan industri hijau. 1.4. Modernisasi dan digitalisasi alat praktik mengajar. 1.5. Pemeliharaan dan manajemen sarpras SMK melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) perawatan sarpras, Pelatrihan teknisi internal, serta Penggunan Sistem Digital Inventory untuk pengelolaan sarpras secara transparan. 1.6. Joint Invesment dengan Pemerintah dan DUDI.
		2. Peningkatan kompetensi guru SMK sesuai dengan dunia kerja	2.1. Peningkatan kompetensi teknis dan pedagodik Guru SMK melalui pelatihan berbasis industry, upgrade pedagogic dengan Project Based Learning, program micro teaching dan peer learning. 2.2. Magang atau praktik pada DUDI, termasuk untuk kolaborasi riset terapan. 2.3. Sertifikasi dan standarisasi kompetensi melalui skema *Recognition of Priori Learning* (RPL) bagi Guru pengalam industry. 2.4. Penguatan komunitas belajar Guru Vokasi (MGMP Guru Vokasi). 2.5. Pelatihan *e-learning* dan *blended learning* untuk pemnfaatn platform digital.
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Melakukan evaluasi pelayanan publik secara berkala sebagai dasar untuk digitalisasi layanan, dilanjutkan dengan penerapan sistem manajemen mutu perangkat daerah, integrasi sistem pengaduan terpadu, serta pengembangan pelayanan adaptif berbasis data untuk meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah yang responsif dan berintegritas.	1.1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan responsif berbasis teknologi informasi; 1.2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas ASN; 1.3. Penguatan dan implementasi budaya integritas dan kode etik pegawai atau penyelenggara pemerintah;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Melaksanakan identifikasi risiko utama secara sistematis, disertai dengan pengembangan kebijakan mitigasi yang komprehensif, pelaksanaan simulasi manajemen risiko secara berkala, integrasi hasil manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, serta audit risiko tahunan guna meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah yang proaktif dan berkelanjutan.	1.1. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi; 1.2. Penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi

Berdasarkan stretegi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang telah disusun secara ringkas, berikut pentahapan prioritas Pembangunan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 – 2029

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Konsolidasi dan penguatan fondasi pemenuhan akses pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan berbasis transparansi dan akuntabilitas.	Perluasan dan pemerataan akses, mutu dan relevansi pendidikan berbasis digitalisasi dan berorientasi kolaborasi multipihak	Penguatan kapasitas dan kualitas akses, mutu dan relevansi pendidikan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah	Inovasi dan pengembangan akses, mutu, relevansi pendidikan berorientasi praktik baik dalam skala nasional dan global.	Perwujudan keberlanjutan akses, mutu dan relevansi pendidikan berbasis Sistem Pendidikan Terintegrasi berorientasi good governance dan kemitraan global.

Selain pentahapan di atas, RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan focus dan tema pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

a. **Tahun 2026**, Tema Pembangunan Jawa Tengah adalah "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional":
   - *Outcome* yang diharapkan dari sektor pendidikan adalah terwujudnya lulusan SMA, SMK dan SLB yang terampil dalam agribisnis, ketahanan pangan, dan pertanian modern sebagai basis utama Jawa Tengah sebagai penopang pangan nasional.
   - **Tolok ukur keberhasilan** meliputi: (1) Jumlah Mapel (Mata pelajaran) SMA, SMK dan SLB yang mengintegrasikan tema agribisnis, pertanian dan pangan dalam RPP setiap semester; (2) Persentase lulusan SMK Unggulan Jawa Tengah bidang keahlian agribisnis, pertanian dan pangan yang terserap DUDI dan wirausaha pertanian dan pangan; (3) Siswa SMA yang memiliki prestasi dengan tema pertanian dan pangan pada skala regional, nasional maupun global serta (4) Jumlah lulusan siswa SLB yang mandiri
b. **Tahun 2027**, Tema Pembangunan Jawa Tengah adalah "Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi":
   - *Outcome* yang diharapkan dari sektor pendidikan adalah terwujudnya lulusan SMA, SMK dan SLB sebagai tenaga kerja dan wirausaha muda dalam pariwisata kreatif, desa wisata, serta layanan ekonomi syariah untuk mendukung ekonomi daerah.
   - **Tolok ukur keberhasilan** meliputi: (1) Jumlah Mapel (Mata pelajaran) SMA, SMK dan SLB yang mengintegrasikan tema pariwisata, budaya ekonomi kreatif dan syariah dalam RPP setiap semester; (2) Persentase lulusan SMK Unggulan Jawa Tengah bidang keahlian pariwisata, budaya ekonomi kreatif

dan syariah yang terserap DUDI dan wirausaha kreatif dan halal; (3) Siswa SMA yang memiliki prestasi dengan tema ekonomi kreatif atau ekonomi syariah pada skala regional, nasional maupun global serta (4) Jumlah lulusan siswa SLB yang mandiri.

c. **Tahun 2028**, Tema Pembangunan Jawa Tengah adalah "**Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau**":
   - ***Outcome*** yang diharapkan dari sektor pendidikan adalah lulusan SMA, SMK dan SLB dengan penguasaan, pengetahuan, ketrampilan dan keahlian di bidang energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan green economy sehingga mendukung industrialisasi hijau Jawa Tengah.
   - **Tolok ukur keberhasilan** meliputi: (1) Jumlah Mapel (Mata pelajaran) SMA, SMK dan SLB yang mengintegrasikan tema industri hijau dalam RPP setiap semester; (2) Persentase lulusan SMK Unggulan Jawa Tengah bidang keahlian industri hijau yang terserap *green* DUDI dan wirausaha mandiri ramah lingkungan; (3) Siswa SMA yang memiliki prestasi dengan tema ramah lingkungan pada skala regional, nasional maupun global (4) Jumlah lulusan siswa SLB yang mandiri.

d. **Tahun 2029**, Tema Pembangunan Jawa Tengah adalah "**Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan**":
   - ***Outcome*** yang diharapkan dari sektor pendidikan adalah lulusan SMA, SMK dan SLB yang kompetitif, adaptif, dan berdaya saing nasional dan global.
   - **Tolok ukur keberhasilan** meliputi: (1) Jumlah Mapel (Mata pelajaran) yang mengintegrasikan muatan lokal (potensi lokal) dalam RPP setiap semester, (2) Persentase lulusan SMK Unggulan Jawa Tengah berbasis potensi lokal yang terserap DUDI dan wirausaha mandiri serta (3) Jumlah lulusan siswa SLB yang mandiri.

e. **Tahun 2030**, Tema Pembangunan Jawa Tengah adalah **"Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan":**
   - ***Outcome*** yang diharapkan dari sektor pendidikan adalah lulusan SMA, SMK dan SLB yang berkualitas, adaptif, inovatif, dan berkarakter sebagai wujud nyata capaian pembangunan Jawa Tengah berkelanjutan.
   - **Tolok ukur keberhasilan** meliputi: (1) Jumlah Mapel (Mata pelajaran) yang mengintegrasikan isu-isu global dalam RPP setiap semester, (2) Persentase lulusan SMA Unggulan Garuda Transformasi yang melanjutkan ke 100 perguruan tinggi top dunia, (3) Jumlah lulusan SMK terserap DUDI skala global serta (4) Jumlah lulusan siswa SLB yang mandiri.

2.3. Manajemen Risiko Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rencana Pengendalian Terhadap Risiko Startegis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tujuan/Sasaran Strategis Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua	**Harapan Lama Sekolah**							
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Th 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 th Penyandang Disabilitas	Aspek politis yang tidak selaras dengan kebijakan pendidikan	12	Usulan pemerataan akses seperti pembangunan USB pembangunan sarpras mendasarkan pada usulan Kepala Daerah tertentu	Pemerataan akses layanan terfokus hanya di beberapa Lokasi dengan kategori lokasi tersebut tidak masuk wilayah *blank spot*	Pemetaan wilayah blank spot dan melakukan inovasi untuk perluasan akses	Dinas Pendidikan	Tahun 2030
		Kecurangan dalam pelaksanaan	20	Intervensi/pemaksaan dari orang tua untuk memilih sekolah Favorit	Pemerataan akses dan kualitas pendidikan tidak	Sosialisasi SPMB serta membangun kemitraan dengan kab/kota	Dinas Pendidikan	Tahun 2030

Tujuan/Sasaran Strategis Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		penerimaan siswa baru			merata, sehingga adanya eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri			
Meningkatnya Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	% Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk literasi dan numerasi	Keengganan guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	12	Beban guru untuk penyelesaian administrasi	Siswa kurang inovasi dan kurang menangkap perkembangan zaman	Penerapan mapel pilihan untuk mendukung sekolah unggulan	Dinas Pendidikan	Tahun 2030
		Keengganan siswa melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	12	- Tidak adanya kebijkan ujian nasional - Keengganan orang tua untu mendampingi anaknya belajar	Literasi dan numerasi siswa rendah	Forum guru dan wali murid	Dinas Pendidikan	
Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Kerjasama multipihak tidak terjadi	12	Penjurusan SMK sudah majemuk	Terbatasnya DUDI yang melakukan Kerjasama dengan SMK	Identifikasi penjurusan SMK yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman	Dinas Pendidikan	Tahun 2030

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pendidikan merupakan Dinas dengan tugas melaksanakan urusan bidang pendidikan. Selaras dengan tugas dan fungsinya adapun program, kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Program Dinas Pendidikan

Urusan Pendidikan

1. Program Pengelolaan Pendidikan ;
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Program Pengendalian Perizinan;
4. Program Pengembangan Kurikulum

Urusan Penunjang Urusan

1. Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi

b. Kegiatan Dinas Pendidikan

Urusan Pendidikan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang mencakup sub kegiatan: Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah, Pembangunan Laboratorium/UKS, Perpusatakaan, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah/Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah/TU, Rehabilitasi sarana dan prasarana utilitas sekolah, Rehabilitasi Laboratorium/UKS/Perpustakaan, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMA termasuk beasiswa Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas, Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas, Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, Penguatan karakter dan edukasi 7 kebiasaaan anak Indonesia hebat termasuk didalamnya konsumsi makanan sehat dan bergizi, Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, Pengembangan konten digital untuk digitalisasi pendidikan ; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang mencakup sub kegiatan: Pembangunan Unit Sekolah Baru,

Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah, Pembangunan Laboratorium/UKS Perpusatakaan, Pembangunan Ruang Praktik Siswa, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah/Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah/TU, Rehabilitasi sarana dan prasarana utilitas sekolah, Rehabilitasi Laboratorium/UKS/Perpustakaan, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMK, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan, Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan, Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, Penguatan karakter dan edukasi 7 kebiasaaan anak Indonesia hebat termasuk didalamnya konsumsi makanan sehat dan bergizi, Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, Pengembangan konten digital untuk digitalisasi pendidikan ; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK;

3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus yang mencakup sub kegiatan : Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah, Pembangunan Laboratorium/UKS, Perpusatakaan, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah/Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah/TU, Rehabilitasi sarana dan prasarana utilitas sekolah, Rehabilitasi Laboratorium/UKS/Perpustakaan, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMA, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas, Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas, Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, Penguatan karakter dan edukasi 7 kebiasaaan anak Indonesia hebat termasuk didalamnya konsumsi makanan sehat dan bergizi, Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, Pengembangan konten digital untuk digitalisasi pendidikan ; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan;
4. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang mencakup sub kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus, termasuk untuk integrasi dengan tema pembangunan Jawa Tengah, dan menjadi bagian dari perwujudan Sekolah Unggulan Jawa Tengah.

5. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang mencakup sub kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah termasuk untuk integrasi dengan tema pembangunan Jawa Tengah, dan menjadi bagian dari perwujudan Sekolah Unggulan Jawa Tengah ;
6. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang mencakup sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
7. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang mencakup sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat termasuk dalam perijinan pendirian Sekolah Rakyat;
8. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang mencakup sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Urusan Penunjang Pemerintah Daerah

1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mencakup sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mencakup sub kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mencakup sub kegiatan : Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang mencakup sub kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;

5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mencakup sub kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD;
6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang mencakup sub kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, imbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang mencakup sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD;
8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang mencakup sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Secara ringkas program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua *												3.446.103.850.000		3.422.895.709.000		3.418.155.528.000		3.525.519.438.000		3.644.101.201.000	Dinas Pendidikan		
							Harapan Lama Sekolah (HLS) *	Tahun	12,86	12,97	13,03		13,09		13,15		13,21		13,29		Dinas Pendidikan		
	Meningkatnya Akses Lay											151.931.959.000		145.470.758.000		138.039.007.000		142.882.023.000		142.959.022.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	anan Pendidikan Menengah dan Khusus **																						
							Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun **	%	71,6	72,24	72,88	144.129.689.000	73,53	137.948.488.000	74,16	129.511.487.000	74,8	134.053.986.000	75,45	134.125.985.000	Dinas Pendidikan		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									43.652.000.000		37.500.000.000		23.500.000.000		27.802.000.000		27.802.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Meningkatnya pemerataan pendidikan menengah	APK SMA ***	%	30,27	30,3	30,32	21.540.000.000	30,35	18.700.000.000	30,36	4.700.000.000	30,37	5.700.000.000	30,38	5.700.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pemb		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						tingkat SMA															inaan SMA		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								21.540.000.000		18.700.000.000		4.700.000.000		5.700.000.000		5.700.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Terpenuhinya daya tampung SMA secara merata di Bidang Pembinaan SMA	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA ****	Angka	0,28	0,38	0,48	21.540.000.000	0,58	18.700.000.000	0,68	4.700.000.000	0,78	5.700.000.000	0,88	5.700.000.000	Bidang Pembinaan SMA		
		1.01.02.1.01.00001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) *****							20.000.000.000		18.000.000.000		4.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun *****	Unit	3	5	2	20.000.000.000	5	18.000.000.000	6	4.000.000.000	7	5.000.000.000	7	5.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.01.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.01.00010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	5	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	53	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pemb		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					inaan SMA		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	189	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	23	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	3	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah *****							1.140.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	1202	N/A	5	1.140.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.00041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	136	4	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.01.00068			Rehabilitasi sedang/ berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	Unit	23	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						sedang/berat	Direhabilitasi sedang/berat *****																	
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0		Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	12	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	11	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.01.0072			Pembangunan Ruang Kelas Baru *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah *****	Ruang	27	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
						Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan tingkat SMA	Angka Putus Sekolah SMA ***	Angka	0,011	0,011	0,011	22.112.000.000	0,011	18.800.000.000	0,011	18.800.000.000	0,011	22.102.000.000	0,01	22.102.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								22.112.000.000		18.800.000.000		18.800.000.000		22.102.000.000		22.102.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Tersediannya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan menengah atas di Bidang Pembinaan SMA	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah ****	Angka	38531	38980	38980	22.112.000.000	38980	18.800.000.000	38980	18.800.000.000	38980	22.102.000.000	38980	22.102.000.000	Bidang Pembinaan SMA		Sumber Pembiayaan APBD dan Non APBD
		1.01.02.1.01.0038			Pengadaan Perlengkapan Sekolah *****							13.192.000.000		12.800.000.000		12.800.000.000		13.192.000.000		13.192.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pemb		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					inaan SMA		
						Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia *****	Paket	32980	32980	32980	13.192.000.000	32980	12.800.000.000	32980	12.800.000.000	32980	13.192.000.000	32980	13.192.000.000	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.01.0045			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas *****							8.920.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		8.910.000.000		8.910.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *****	Peserta Didik	3008	6000	6000	8.920.000.000	6000	6.000.000.000	6000	6.000.000.000	6000	8.910.000.000	6000	8.910.000.000	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAA									43.101.200.000		43.000.000.000		48.500.000.000		48.601.200.000		48.601.200.000	Dinas Pendidikan - Bida		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			N PENDIDIKAN ***																		ng Pembinaan SMK		
						Meningkatnya pemerataan pendidikan menengah tingkat SMK	APK SMK ***	%	53,7	53,72	53,75	12.000.000.000	53,78	12.000.000.000	53,8	17.500.000.000	53,81	17.500.000.000	53,82	17.500.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								12.000.000.000		12.000.000.000		17.500.000.000		17.500.000.000		17.500.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Terpenuhinya daya tampung SMK secara merata di Bidang	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK ****	Angka	0,5	0,5	0,5	12.000.000.000	0,5	12.000.000.000	0,5	17.500.000.000	0,51	17.500.000.000	0,51	17.500.000.000	Bidang Pembinaan SMK		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pembinaan SMK																	
		1.01.02.1.02.0001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) *****							12.000.000.000		12.000.000.000		17.500.000.000		17.500.000.000		17.500.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun *****	Unit	3	3	1	12.000.000.000	4	12.000.000.000	4	17.500.000.000	7	17.500.000.000	8	17.500.000.000	Bidang Pembinaan SMK	Bidang Pembinaan SMK, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMK		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terbangun	Telah Dibangun *****																
		1.01.02.1.02.00004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02.00005			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Ruang Laboratorium yang	Jumlah Ruang Laboratorium yang	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pemb		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terbangun	Telah Dibangun *****														inaan SMK		
		1.01.02.1.02.00006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02.00010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02.00016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02.00018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pemb		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					inaan SMK		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pemb		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					inaan SMK		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02.00063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02.00064			Pembangunan Ruang Kelas Baru *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan SMK		
						Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan tingkat SMK	Angka Putus Sekolah SMK ***	Angka	0,027	0,026	0,026	31.101.200.000	0,026	31.000.000.000	0,025	31.000.000.000	0,024	31.101.200.000	0,024	31.101.200.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								31.101.200.000		31.000.000.000		31.000.000.000		31.101.200.000		31.101.200.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Tersediannya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan menengah kejuruan di Bidang Pembinaan SMK	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah ****	Angka	57477	58146	57253	31.101.200.000	57253	31.000.000.000	57253	31.000.000.000	57253	31.101.200.000	57253	31.101.200.000	Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02.0030			Pengadaan Perlengkapan Sekolah *****							20.101.200.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.101.200.000		20.101.200.000	Dinas Pendidikan - Bidang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					Pembinaan SMK		
						Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia *****	Paket	50253	50253	50253	20.101.200.000	50253	20.000.000.000	50253	20.000.000.000	50253	20.101.200.000	50253	20.101.200.000	Bidang Pembinaan SMK	Bidang Pembinaan SMK, JAWA TENGAH	Sumber Pembiayaan APBD dan Non APBD
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan *****							11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya	Peserta Didik	7224	7893	7000	11.000.000.000	7000	11.000.000.000	7000	11.000.000.000	7000	11.000.000.000	7000	11.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	Bidang Pembinaan SMK, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Peserta Didik	Personil Peserta Didik *****																
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I ***	%	N/A	73,33	76,67	1.822.300.000	80	1.822.300.000	83,33	1.822.300.000	86,67	1.822.300.000	90	1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan menengah kejuruan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin I ****	Angka	90	90	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta							1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000	Dinas Pendidikan -		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Didik Sekolah Menengah Kejuruan *****																CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *****	Peserta Didik	N/A	90	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II ***	%	77,8	77,1	77,9	12.000.000.000	78,8	12.000.000.000	79,7	12.000.000.000	80,5	12.000.000.000	81,4	12.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin II ****	Angka	358	360	360	12.000.000.000	360	12.000.000.000	360	12.000.000.000	360	12.000.000.000	360	12.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						pendidikan menengah kejuruan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II															RUAN		
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan *****							12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *****	Peserta Didik	N/A	360	360	12.000.000.000	360	12.000.000.000	360	12.000.000.000	360	12.000.000.000	360	12.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III ***	%	N/A	69,44	76,39	8.000.000.000	77,78	8.000.000.000	80,56	8.000.000.000	83,33	8.000.000.000	90,28	8.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Men								8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				engah Kejuruan ****																	WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan menengah kejuruan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin III ****	Angka	167	167	167	8.000.000.000	167	8.000.000.000	167	8.000.000.000	167	8.000.000.000	167	8.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan *****							8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *****	Peserta Didik	N/A	282	216	8.000.000.000	216	8.000.000.000	216	8.000.000.000	216	8.000.000.000	216	8.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									5.466.900.000		5.466.900.000		5.466.900.000		5.466.900.000		5.466.900.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah	%	N/A	66,67	73,33	5.466.900.000	76,67	5.466.900.000	80	5.466.900.000	83,33	5.466.900.000	86,67	5.466.900.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan IV	Pendidikan IV ***														PENDIDIKAN IV		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								5.466.900.000		5.466.900.000		5.466.900.000		5.466.900.000		5.466.900.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan menengah kejuruan di Cabang Dinas	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IV ****	Angka	258	270	270	5.466.900.000	270	5.466.900.000	270	5.466.900.000	270	5.466.900.000	270	5.466.900.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan IV																	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan *****							5.466.900.000		5.466.900.000		5.466.900.000		5.466.900.000		5.466.900.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *****	Peserta Didik	270	270	270	5.466.900.000	270	5.466.900.000	270	5.466.900.000	270	5.466.900.000	270	5.466.900.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V ***	%	N/A	66,67	73,33	1.822.300.000	76,67	1.822.300.000	80	1.822.300.000	83,33	1.822.300.000	86,67	1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Men								1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				engah Keju ruan ****																	WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan menengah kejuruan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin V ****	Angka	83	90	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan *****							1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *****	Peserta Didik	N/A	N/A	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									3.644.600.000		3.644.600.000		3.644.600.000		3.644.600.000		3.644.600.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah	%	57,14	66,18	68,49	3.644.600.000	69,33	3.644.600.000	71,79	3.644.600.000	72,6	3.644.600.000	73,33	3.644.600.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan VI	Pendidikan VI ***														PENDIDIKAN VI		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								3.644.600.000		3.644.600.000		3.644.600.000		3.644.600.000		3.644.600.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan menengah kejuruan di Cabang Dinas	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin VI ****	Angka	180	180	180	3.644.600.000	180	3.644.600.000	180	3.644.600.000	180	3.644.600.000	180	3.644.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan VI																	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan *****							3.644.600.000		3.644.600.000		3.644.600.000		3.644.600.000		3.644.600.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *****	Peserta Didik	N/A	180	180	3.644.600.000	180	3.644.600.000	180	3.644.600.000	180	3.644.600.000	180	3.644.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									7.289.200.000		7.289.200.000		7.289.200.000		7.289.200.000		7.289.200.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX ***	%	N/A	62,5	69,17	7.289.200.000	72,5	7.289.200.000	75	7.289.200.000	78,33	7.289.200.000	80,83	7.289.200.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Men								7.289.200.000		7.289.200.000		7.289.200.000		7.289.200.000		7.289.200.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				engah Keju ruan ****																	WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersediany a bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan menengah kejuruan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IX ****	Angka	360	360	360	7.289.200.000	360	7.289.200.000	360	7.289.200.000	360	7.289.200.000	360	7.289.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan *****							7.289.200.000		7.289.200.000		7.289.200.000		7.289.200.000		7.289.200.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *****	Peserta Didik	N/A	N/A	360	7.289.200.000	360	7.289.200.000	360	7.289.200.000	360	7.289.200.000	360	7.289.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									12.644.600.000		12.644.600.000		12.644.600.000		12.644.600.000		12.644.600.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Meningkatnya keterjangkauan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah	%	N/A	67,31	71,15	12.644.600.000	73,72	12.644.600.000	75,64	12.644.600.000	78,85	12.644.600.000	83,33	12.644.600.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan X	Pendidikan X ***														PENDIDIKAN X		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								12.644.600.000		12.644.600.000		12.644.600.000		12.644.600.000		12.644.600.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan menengah kejuruan di Cabang Dinas	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin X ****	Angka	345	348	348	12.644.600.000	348	12.644.600.000	348	12.644.600.000	348	12.644.600.000	348	12.644.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan X																	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan *****							12.644.600.000		12.644.600.000		12.644.600.000		12.644.600.000		12.644.600.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *****	Peserta Didik	N/A	N/A	468	12.644.600.000	468	12.644.600.000	468	12.644.600.000	468	12.644.600.000	468	12.644.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI ***	%	N/A	33,33	43,33	1.822.300.000	50	1.822.300.000	56,66	1.822.300.000	63,33	1.822.300.000	76,66	1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Men								1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				engah Kejuruan ****																	WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan menengah kejuruan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XI ****	Angka	90	90	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan *****							1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *****	Peserta Didik	N/A	N/A	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah	%	N/A	68	70	1.822.300.000	72	1.822.300.000	75	1.822.300.000	77	1.822.300.000	79	1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan XII	Pendidikan XII ***														PENDIDIKAN XII		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersediannya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan menengah kejuruan di Cabang Dinas	Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XII ****	Angka	90	90	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan XII																	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan *****							1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000		1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *****	Peserta Didik	N/A	90	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ***									681.989.000		743.988.000		805.987.000		867.986.000		929.985.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
						Meningkatnya distribusi pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SMA dan SMK ***	Angka	0,41	0,42	0,43	681.989.000	0,44	743.988.000	0,45	805.987.000	0,46	867.986.000	0,47	929.985.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.04.1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi ****								681.989.000		743.988.000		805.987.000		867.986.000		929.985.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
						Meningkatnya distribusi pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan di Bidang Pembinaan Guru dan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah yang didistribusikan ****	Orang	13791	2291	2265	681.989.000	2292	743.988.000	2327	805.987.000	2429	867.986.000	2167	929.985.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tenaga Kependidikan															Kependidikan		
		1.01.04.1.01.00002			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus *****							681.989.000		743.988.000		805.987.000		867.986.000		929.985.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanaya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus *****	Laporan	N/A	641	691	681.989.000	741	743.988.000	791	805.987.000	841	867.986.000	891	929.985.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Bidang Pembinaan Ketenagaan Dikbud, JAWA TENGAH	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									30.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I ***	%	93,75	93,75	94	30.000.000	94,2	30.000.000	94,5	30.000.000	94,8	40.000.000	95	40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SMA dan SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin I ****	Dokumen	15	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	15	6	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									30.000.000		30.000.000		30.000.000		17.300.000		17.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II ***	%	70	70,1	70,36	30.000.000	70,71	30.000.000	71,63	30.000.000	71,97	17.300.000	72,35	17.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		17.300.000		17.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SMA dan SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin II ****	Angka	N/A	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	17.300.000	3	17.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		17.300.000		17.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	2	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	17.300.000	2	17.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									30.000.000		30.000.000		30.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III ***	%	25,81	75	75,2	30.000.000	75,4	30.000.000	75,6	30.000.000	75,8	80.000.000	76	90.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SMA dan SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin III ****	Dokumen	1	2	2	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	80.000.000	3	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									30.000.000		40.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV ***	%	30	33	35	30.000.000	40	40.000.000	45	30.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								30.000.000		40.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SMA dan SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin 4 ****	Dokumen	4	1	1	30.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							30.000.000		40.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	4	1	1	30.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V ***	%	11,9	11,9	17,4	30.000.000	22,3	30.000.000	26,7	50.000.000	28,9	50.000.000	30,2	50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SMA dan SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin V ****	Dokumen	2	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									30.000.000		30.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI ***	%	92,3	70,5	70,8	30.000.000	71,2	30.000.000	71,5	20.000.000	71,9	20.000.000	72,3	20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								30.000.000		30.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SMA dan SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin VI ****	Dokumen	1	15	12	30.000.000	10	30.000.000	8	20.000.000	7	20.000.000	6	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							30.000.000		30.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	1	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII ***	%	N/A	60	60	30.000.000	65	30.000.000	65	40.000.000	70	40.000.000	70	40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SMA dan SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin VII ****	Dokumen	27	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	N/A	4	30.000.000	4	30.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									30.000.000		30.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII ***	%	N/A	60	60	30.000.000	65	30.000.000	65	21.000.000	70	21.000.000	70	21.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								30.000.000		30.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SMA dan SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin VIII ****	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							30.000.000		30.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									30.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX ***	%	1	60	60	30.000.000	65	20.000.000	65	20.000.000	70	20.000.000	70	20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								30.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SMA dan SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin IX ****	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							30.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	N/A	1	30.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									30.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X ***	%	N/A	100	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								30.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SMA dan SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin X ****	Dokumen	N/A	1	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							30.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	N/A	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									30.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI ***	%	100	50	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SMA dan SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin XI ****	Dokumen	5	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	N/A	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII ***	%	45,45	80	85	30.000.000	88	30.000.000	90	30.000.000	92	30.000.000	95	30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SMA dan SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin XII ****	Dokumen	5	6	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	N/A	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
							Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas **	%	56,7	65,36	74,02	7.802.270.000	75,11	7.522.270.000	76,2	8.527.520.000	77,29	8.828.037.000	78,38	8.833.037.000	Dinas Pendidikan		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDI									7.682.270.000		7.402.270.000		8.402.270.000		8.682.270.000		8.682.270.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			KAN ***																		Diksus		
						Meningkatnya pemerataan pendidikan khusus	APK SLB ***	%	91,54	91,64	91,74	4.152.270.000	91,84	4.152.270.000	91,94	5.152.270.000	92,04	5.152.270.000	92,14	5.152.270.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								4.152.270.000		4.152.270.000		5.152.270.000		5.152.270.000		5.152.270.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Terpenuhinya daya tampung SLB secara merata di Bidang Pembinaan Diksus	Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB ****	Angka	0,94	0,94	0,94	4.152.270.000	0,95	4.152.270.000	0,95	5.152.270.000	0,95	5.152.270.000	0,95	5.152.270.000	Bidang Pembinaan Diksus		
		1.01.02.1.			Pembangunan Unit							3.500		3.500		4.500		4.500		4.500	Dinas Pendi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		03.00 01			Sekolah Baru (USB) *****							.000. 000		.000. 000		.000. 000		.000. 000		.000. 000	dikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun *****	Unit	1	1	1	3.500 .000. 000	1	3.500 .000. 000	1	4.500 .000. 000	2	4.500 .000. 000	2	4.500 .000. 000	Bidang Pembinaan Diksus	Bidang Pembinaan Diksus, JAWA TENGAH	
		1.01. 02.1. 03.00 03			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	8	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan Diksus		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	5	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan Diksus		
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	39	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terbangun	yang Telah Dibangun *****														Diksus		
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	300	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan Diksus		
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							652.270.000		652.270.000		652.270.000		652.270.000		652.270.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	8	8	652.270.000	8	652.270.000	8	652.270.000	8	652.270.000	8	652.270.000	Bidang Pembinaan Diksus	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan Diksus		
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasara							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bida		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					na dan Utilitas Sekolah *****																ng Pembinaan Diksus		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Unit	8	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan Diksus		
		1.01.02.1.03.0070			Pembangunan Ruang Kelas Baru *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah *****	Ruang	77	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan Diksus	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.00 80			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	7	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Bidang Pembinaan Diksus		
						Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan khusus	Angka Putus Sekolah SLB ***	Angka	0,045	0,044	0,043	3.530.000.000	0,042	3.250.000.000	0,041	3.250.000.000	0,039	3.530.000.000	0,038	3.530.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pend								3.530.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.530.000.000		3.530.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				idikan Khusus ****																	- Bidang Pembinaan Diksus		
						Tersediannya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan khusus di Bidang Pembinaan Diksus	Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah ****	Angka	4250	4700	4710	3.080.000.000	4720	2.800.000.000	4730	2.800.000.000	4740	3.080.000.000	4750	3.080.000.000	Bidang Pembinaan Diksus		
		1.01.02.1.03.0037			Pengadaan Perlengkapan Sekolah *****							1.080.000.000		800.000.000		800.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang	Paket	2250	2700	2700	1.080.000.000	2700	800.000.000	2700	800.000.000	2700	1.080.000.000	2700	1.080.000.000	Bidang Pembinaan	Bidang Pembinaan Diksus, JAWA TENGAH	Sumber Pembi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersedia *****														Diksus		ayaan APBD dan Non APBD
		1.01.02.1.03.0044			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus *****							2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *****	Peserta Didik	N/A	2000	2000	2.000.000.000	2000	2.000.000.000	2000	2.000.000.000	2000	2.000.000.000	2000	2.000.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	Bidang Pembinaan Diksus, JAWA TENGAH	
						Tersediannya sarana mobilitas sekolah di Bidang	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang	Unit	N/A	N/A	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	Bidang Pembinaan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pembinaan Diksus	Tersedia ****														Diksus		
		1.01.02.1.03.0039			Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah *****							450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia *****	Unit	N/A	1	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	Bidang Pembinaan Diksus, JAWA TENGAH	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I ***	%	N/A	74	74,2	10.000.000	74,3	10.000.000	74,4	10.000.000	74,5	15.000.000	74,8	15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin I ****	Angka	N/A	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.517.000		5.517.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II ***	%	N/A	2,2	2,57	10.000.000	2,93	10.000.000	3	10.000.000	3,21	5.517.000	3,63	5.517.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.517.000		5.517.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin II ****	Angka	N/A	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.517.000	1	5.517.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.517.000		5.517.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.517.000	1	5.517.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III ***	%	N/A	75	75,2	10.000.000	75,4	10.000.000	75,6	10.000.000	75,8	30.000.000	76	35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin III ****	Angka	N/A	1	N/A	10.000.000	N/A	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV ***	%	N/A	33	35	10.000.000	40	10.000.000	45	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin 4 ****	Dokumen	N/A	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									10.000.000		10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V ***	%	11,9	11,9	12,4	10.000.000	12,6	10.000.000	12,8	25.000.000	12,9	25.000.000	13	25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								10.000.000		10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan khusus Cabdin V ****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							10.000.000		10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									10.000.000		10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI ***	%	N/A	68,2	68,7	10.000.000	69,2	10.000.000	69,7	5.000.000	70,2	5.000.000	70,7	5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								10.000.000		10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin VI ****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							10.000.000		10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII ***	%	N/A	25	25	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin VII ****	Dokumen	N/A	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	N/A	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									10.000.000		10.000.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII ***	%	N/A	25	25	10.000.000	35	10.000.000	35	5.250.000	50	5.250.000	50	5.250.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								10.000.000		10.000.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin VIII ****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.250.000	1	5.250.000	1	5.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							10.000.000		10.000.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.250.000	1	5.250.000	1	5.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX ***	%	1	25	25	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin IX ****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X ***	%	N/A	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin X ****	Dokumen	N/A	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI ***	%	100	50	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin ****	Dokumen	N/A	6	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN ***									10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII ***	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin XII ****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanany a Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *****	Dokumen	N/A	N/A	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
	Meningkatnya Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus **											3.215.271.891.000		3.198.524.951.000		3.201.216.521.000		3.303.737.415.000		3.422.242.179.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk literasi dan numerasi **	%	61,09	62,95	64,95	3.215.271.891.000	66,95	3.198.524.951.000	68,45	3.201.216.521.000	69,95	3.303.737.415.000	70,95	3.422.242.179.000	Dinas Pendidikan		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									725.147.060.000		724.763.045.000		724.863.045.000		729.863.045.000		733.247.060.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Meningkatnya karakter siswa tingkat SMA	Persentase Prestasi Lomba SMA Tingkat	%	35,82	35,85	35,89	5.000.000.000	35,92	5.000.000.000	35,96	5.000.000.000	35,98	10.000.000.000	36,1	10.000.000.000	Dinas Pendidikan - Bida		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Nasional ***														ng Pembinaan SMA		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Berkembangnya potensi siswa SMA di Bidang Pembinaan SMA	Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional ****	Angka	48	33	38	5.000.000.000	40	5.000.000.000	43	5.000.000.000	46	10.000.000.000	50	10.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA		
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *****							5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik *****	Peserta Didik	93	116	120	5.000.000.000	125	5.000.000.000	128	5.000.000.000	130	10.000.000.000	132	10.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tingkat SMA	Nilai Kualitas Pembelajaran SMA ***	Angka	63,85	65,13	64,45	720.147.060.000	64,95	719.763.045.000	65	719.863.045.000	65,23	719.863.045.000	65,25	723.247.060.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								720.147.060.000		719.763.045.000		719.863.045.000		719.863.045.000		723.247.060.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terwujudnya pengelolaan satuan pendidikan SMA dengan baik di Bidang Pembinaan SMA	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA ****	Angka	58,29	59,81	60,31	720.147.060.000	60,5	719.763.045.000	60,61	719.863.045.000	61	719.863.045.000	61,25	723.247.060.000	Bidang Pembinaan SMA		
		1.01.02.1.01.00053			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas *****							718.747.060.000		718.747.060.000		718.747.060.000		718.747.060.000		718.747.060.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA		
						Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS *****	Satuan Pendidikan	N/A	865	867	718.747.060.000	867	718.747.060.000	868	718.747.060.000	868	718.747.060.000	870	718.747.060.000	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.01.00060			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi							1.400.000.000		1.015.985.000		1.115.985.000		1.115.985.000		4.500.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pemb		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Layanan di Bidang Pendidikan *****																inaan SMA		
						Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan *****	Dokumen	N/A	1	4	1.400.000.000	4	1.015.985.000	4	1.115.985.000	4	1.115.985.000	4	4.500.000.000	Bidang Pembinaan SMA	Bidang Pembinaan SMA, JAWA TENGAH	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									1.352.324.495.000		1.349.674.495.000		1.349.724.495.000		1.353.474.495.000		1.356.524.495.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Meningkatnya karakter siswa tingkat SMK	Persentase Prestasi Lomba SMK Tingkat	%	28,82	55,56	57	5.000.000.000	58,5	2.300.000.000	59	2.300.000.000	59	6.000.000.000	60	6.000.000.000	Dinas Pendidikan - Bida		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Nasional ***														ng Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								5.000.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Berkembangnya potensi siswa SMK di Bidang Pembinaan SMK	Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional ****	Angka	40	40	31	5.000.000.000	31	2.300.000.000	32	2.300.000.000	32	6.000.000.000	32	6.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *****							5.000.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik *****	Peserta Didik	64	50	50	5.000.000.000	50	2.300.000.000	50	2.300.000.000	50	6.000.000.000	50	6.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	Bidang Pembinaan SMK, JAWA TENGAH	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tingkat SMK	Nilai Kualitas Pembelajaran SMK ***	Angka	61,96	60,64	60,86	1.347.324.495.000	60,98	1.347.374.495.000	61,03	1.347.424.495.000	61,05	1.347.474.495.000	64,5	1.350.524.495.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								1.347.324.495.000		1.347.374.495.000		1.347.424.495.000		1.347.474.495.000		1.350.524.495.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terwujudnya pengelolaan satuan pendidikan SMK dengan baik di Bidang Pembinaan SMK	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK ****	Angka	54,6	54,65	54,75	1.347.324.495.000	54,85	1.347.374.495.000	54,9	1.347.424.495.000	54,95	1.347.474.495.000	55	1.350.524.495.000	Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02.00046			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan *****							1.343.024.495.000		1.343.024.495.000		1.343.024.495.000		1.343.024.495.000		1.343.024.495.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS *****	Satuan Pendidikan	1535	1528	1540	1.343.024.495.000	1541	1.343.024.495.000	1541	1.343.024.495.000	1541	1.343.024.495.000	1541	1.343.024.495.000	Bidang Pembinaan SMK	Bidang Pembinaan SMK, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.02.00053			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi							4.300.000.000		4.350.000.000		4.400.000.000		4.450.000.000		7.500.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pemb		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Layanan di Bidang Pendidikan *****																inaan SMK		
						Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan *****	Dokumen	N/A	5	5	4.300.000.000	5	4.350.000.000	5	4.400.000.000	5	4.450.000.000	5	7.500.000.000	Bidang Pembinaan SMK	Bidang Pembinaan SMK, JAWA TENGAH	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									87.896.835.000		89.096.835.000		90.296.835.000		91.496.835.000		92.696.835.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Meningkatnya karakter siswa pendidikan khusus	Persentase Prestasi Lomba SLB Tingkat	%	53,85	53,9	54,05	2.000.000.000	54,45	2.100.000.000	54,9	2.200.000.000	55,1	2.300.000.000	55,65	2.400.000.000	Dinas Pendidikan - Bida		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Nasional ***														ng Pembinaan Diksus		
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								2.000.000.000		2.100.000.000		2.200.000.000		2.300.000.000		2.400.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Berkembangnya potensi siswa SLB di Bidang Pembinaan Diksus	Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional ****	Angka	14	14	15	2.000.000.000	15	2.100.000.000	15	2.200.000.000	16	2.300.000.000	16	2.400.000.000	Bidang Pembinaan Diksus		
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *****							2.000.000.000		2.100.000.000		2.200.000.000		2.300.000.000		2.400.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik *****	Peserta Didik	26	26	26	2.000.000.000	26	2.100.000.000	26	2.200.000.000	26	2.300.000.000	26	2.400.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	Bidang Pembinaan Diksus, JAWA TENGAH	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan khusus	Nilai Kualitas Pembelajaran SLB ***	Angka	67,51	65,31	65,61	85.896.835.000	65,91	86.996.835.000	66,21	88.096.835.000	66,51	89.196.835.000	66,81	90.296.835.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								85.896.835.000		86.996.835.000		88.096.835.000		89.196.835.000		90.296.835.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terwujudnya pengelolaan satuan pendidikan SLB dengan baik di Bidang Pembinaan Diksus	Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB ****	Angka	48,73	52,73	52,78	85.896.835.000	52,83	86.996.835.000	52,88	88.096.835.000	52,93	89.196.835.000	52,98	90.296.835.000	Bidang Pembinaan Diksus		
		1.01.02.1.03.0052			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus *****							84.696.835.000		85.696.835.000		86.696.835.000		87.696.835.000		88.696.835.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus		
						Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS *****	Satuan Pendidikan	188	188	189	84.696.835.000	189	85.696.835.000	189	86.696.835.000	189	87.696.835.000	189	88.696.835.000	Bidang Pembinaan Diksus	Bidang Pembinaan Diksus, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.03.0059			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluas							1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		1.600.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					i Layanan di Bidang Pendidikan *****																Pembinaan Diksus		
						Terlaksanya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan *****	Dokumen	1	1	8	1.200.000.000	8	1.300.000.000	8	1.400.000.000	8	1.500.000.000	8	1.600.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	Bidang Pembinaan Diksus, JAWA TENGAH	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									1.578.515.000		785.877.000		847.502.000		1.663.621.000		1.734.753.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SMA Bersertifikat Kompetensi ***	%	70,44	75,65	76,84	1.036.188.000	78,84	309.687.000	80,84	335.536.000	82,84	1.113.969.000	84,84	1.145.246.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								1.036.188.000		309.687.000		335.536.000		1.113.969.000		1.145.246.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Guru dan Tenaga Kependidikan SMA yang Memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang Bersertifikat Kompetensi ****	Orang	19022	20430	20750	1.036.188.000	21250	309.687.000	21750	335.536.000	22250	1.113.969.000	22750	1.145.246.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
		1.01.02.1.01.0075			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan *****							1.036.188.000		309.687.000		335.536.000		1.113.969.000		1.145.246.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan *****	Orang	N/A	719	784	1.036.188.000	849	309.687.000	914	335.536.000	979	1.113.969.000	1044	1.145.246.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Bidang Pembinaan Ketenagaan Dikbud, JAWA TENGAH	
						Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi ***	%	57,94	61,14	62,13	318.661.000	64,13	235.027.000	66,13	253.157.000	68,13	273.032.000	70,13	294.895.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidika								318.661.000		235.027.000		253.157.000		273.032.000		294.895.000	Dinas Pendidikan -		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				n Sekolah Menengah Kejuruan ****																	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
						Tersediannya Guru dan Tenaga Kependidikan SMK yang Memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang Bersertifikat Kompetensi ****	Orang	27102	28598	29060	318.661.000	29660	235.027.000	30260	253.157.000	3086 0	273.032.000	3146 0	294.895.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
		1.01.02.1.02.0073			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang							318.661.000		235.027.000		253.157.000		273.032.000		294.895.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pemb		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan *****																inaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
						Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan *****	Orang	N/A	N/A	657	318.661.000	571	235.027.000	747	253.157.000	792	273.032.000	837	294.895.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Bidang Pembinaan Ketenagaan Dikbud, JAWA TENGAH	
						Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SLB Bersertifikat Kompetensi ***	%	52,24	56,65	57,72	223.666.000	59,72	241.163.000	61,72	258.809.000	63,72	276.620.000	65,72	294.612.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					Tenaga Kependidikan		
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								223.666.000		241.163.000		258.809.000		276.620.000		294.612.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
						Tersediannya Guru dan Tenaga Kependidikan SLB yang Memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang Bersertifikat Kompetensi ****	Orang	1469	1593	162 3	223.666.000	163 3	241.163.000	164 3	258.809.000	165 3	276.620.000	166 3	294.612.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Kependidikan																	
		1.01.02.1.03.0073			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan *****							223.666.000		241.163.000		258.809.000		276.620.000		294.612.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
						Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Orang	N/A	297	327	223.666.000	357	241.163.000	387	258.809.000	417	276.620.000	447	294.612.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru	Bidang Pembinaan Ketenagaan Dikbud, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Kapasitas Bidang Pendidikan	Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan *****														dan Tenaga Kependidikan		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									3.017.000.000		2.800.000.000		3.025.000.000		3.175.000.000		3.325.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Meningkatnya digitalisasi pendidikan	Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi	%	10	17,5	25	3.017.000.000	32,5	2.800.000.000	40	3.025.000.000	47,5	3.175.000.000	55	3.325.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Penge		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pelatihan Platform Pendidikan ***														mbangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								1.070.000.000		1.000.000.000		1.075.000.000		1.125.000.000		1.175.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Termanfaatkannya platform pendidikan SMA di Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Jumlah guru SMA yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan ****	Orang	2500	4718	6741	1.070.000.000	8763	1.000.000.000	10785	1.075.000.000	12807	1.125.000.000	14829	1.175.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
		1.01.02.1.01.00057			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan *****							550.000.000		550.000.000		600.000.000		625.000.000		650.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajar		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					an Kelas A		
						Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan *****	Orang	2500	4718	6741	550.000.000	8763	550.000.000	10785	600.000.000	12807	625.000.000	14829	650.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.01.00058			Pengembangan konten digital untuk pendidikan *****							520.000.000		450.000.000		475.000.000		500.000.000		525.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					dikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan *****	Konten Digital	5	18	19	520.000.000	20	450.000.000	21	475.000.000	22	500.000.000	23	525.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Men								1.171.000.000		1.150.000.000		1.225.000.000		1.275.000.000		1.325.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				engah Keju ruan ****																	Tekn ologi Pendi dikan dan Mutu Pemb elajar an Kelas A		
						Termanfaatkannya platform pendidikan SMK di Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Jumlah guru SMK yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan ****	Orang	4500	8331	1190 1	1.171 .000. 000	1547 1	1.150 .000. 000	1904 1	1.225 .000. 000	2261 1	1.275 .000. 000	2618 2	1.325 .000. 000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
		1.01. 02.1. 02.00 50			Pembinaan Penggunaan Teknologi,							600.0 00.00 0		600.0 00.00 0		650.0 00.00 0		675.0 00.00 0		700.0 00.00 0	Dinas Pendidikan - Balai		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan *****																Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan *****	Orang	4500	8331	1901	600.000.000	1471	600.000.000	1941	650.000.000	2211	675.000.000	2182	700.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.00051			Pengembangan konten digital untuk pendidikan *****							571.000.000		550.000.000		575.000.000		600.000.000		625.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan *****	Konten Digital	6	22	23	571.000.000	24	550.000.000	25	575.000.000	26	600.000.000	27	625.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajar	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					an Kelas A		
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								776.000.000		650.000.000		725.000.000		775.000.000		825.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Termanfaatkannya platform pendidikan SLB di Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu	Jumlah guru SLB yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan ****	Orang	275	499	712	776.000.000	926	650.000.000	1140	725.000.000	1353	775.000.000	1567	825.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pembelajaran Kelas A															dikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
		1.01.02.1.03.0056			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan *****							300.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanaya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan *****	Orang	275	499	712	300.000.000	926	300.000.000	1140	350.000.000	1353	375.000.000	1567	400.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH	
		1.01.02.1.03.0057			Pengembangan konten digital untuk pendidikan *****							476.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000		425.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajar		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					an Kelas A		
						Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan *****	Konten Digital	5	14	15	476.000.000	16	350.000.000	17	375.000.000	18	400.000.000	19	425.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									91.771.297.000		79.634.145.000		78.869.145.000		86.419.250.000		95.979.358.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN I		
						Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I ***	%	61,63	63,67	65,71	17.118.152.000	67,75	3.685.000.000	69,79	2.920.000.000	71,83	5.705.000.000	73,87	5.320.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								2.000.000.000		1.520.000.000		1.120.000.000		3.340.000.000		3.520.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya sarpras pendidikan SMA kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin I ****	Angka	1493	1543	1593	2.000.000.000	1643	1.520.000.000	1693	1.120.000.000	1743	3.340.000.000	1793	3.520.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		320.000.000.0		0		720.000.000.0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	1	320.000.000.0	N/A	0	2	720.000.000.0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Dibangun *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		720.000.000		0		720.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	1	2	2	0	N/A	0	2	720.000.000	N/A	0	2	720.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah *****							1.000.000.000		300.000.000		0		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	1	5	5	1.000.000.000	5	300.000.000	N/A	0	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.01.00020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		200.000.000		0		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	200.000.000	N/A	0	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		300.000.000		0		300.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilit	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	2	300.000.000	N/A	0	2	300.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Sedang/Berat	asi Sedang/Berat *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							400.000.000		400.000.000		0		400.000.000		400.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	2	400.000.000	2	400.000.000	N/A	0	2	400.000.000	2	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/ berat Sarana, Prasarana dan Utilitas							400.000.000		0		0		0		800.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sekolah *****																SWILAYAH PENDIDIKAN I		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	1	2	2	400.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	4	800.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.01.00070			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		720.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	720.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium *****							200.000.000		0		0		0		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	1	1	200.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								14.918.152.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMK kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin I ****	Angka	1314	1364	144	14.918.152.000	144	1.600.000.000	154	1.600.000.000	154	1.600.000.000	144	1.600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan -		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sekolah /TU *****																CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa *****							1.000.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	2	1.000.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							500.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN I		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	2	500.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Direhabilitasi *****														KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehat							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan -		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					an Sekolah *****																CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.00062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	2	2	0	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.00063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik *****							400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					PENDIDIKAN I		
						Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	2	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							13.018.152.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	4	4	13.018.152.000	4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							sedang/berat *****														RUAN		
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								200.000.000		565.000.000		200.000.000		765.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya sarpras pendidikan SLB kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin I ****	Angka	54	74	94	200.000.000	114	565.000.000	134	200.000.000	154	765.000.000	174	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.03.00008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		365.000.000		0		365.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	1	N/A	N/A	0	1	365.000.000	N/A	0	1	365.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersedia *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang /Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Unit	N/A	2	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN I		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.03.00 80			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		200.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	200.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
						Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I ***	%	66,21	61,09	65,21	70.000.000	67,7	70.000.000	68,9	70.000.000	70,05	250.000.000	71,25	250.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Seko								30.000.000		30.000.000		30.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				lah Mengah Atas ****																	DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMA di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I ****	Angka	N/A	67	67	30.000.000	67	30.000.000	67	30.000.000	67	150.000.000	67	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,							30.000.000		30.000.000		30.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					kekerasan, dan intoleransi *****																		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I ****	Angka	N/A	119	119	30.000.000	119	30.000.000	119	30.000.000	119	50.000.000	119	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I ****	Angka	N/A	17	17	10.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000	17	50.000.000	17	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I ***	%	83,1	83,1	83,1	74.583.145.000	83,2	75.879.145.000	83,2	75.879.145.000	83,22	80.464.250.000	83,22	90.409.358.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah								37.428.599.000		37.860.599.000		37.860.599.000		40.360.204.000		45.781.853.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Menengah Atas ****																	SWILAYAH PENDIDIKAN I		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMA dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I ****	Angka	N/A	67	67	37.428.599.000	67	37.860.599.000	67	37.860.599.000	67	40.360.204.000	67	45.781.853.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas *****							37.428.599.000		37.860.599.000		37.860.599.000		40.360.204.000		45.781.853.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	67	300.000.000	67	300.000.000	67	300.000.000	67	300.000.000	67	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA *****	Siswa	14417	90055	1.975.100.000		912	2.407.100.000	912	2.407.100.000	912	2.407.100.000	912	2.407.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	404	404	35.153.499.000	404	35.153.499.000	404	35.153.499.000	404	37.653.104.000	404	43.074.753.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Menengah Atas															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								33.828.666.000		34.692.666.000		34.692.666.000		36.579.541.000		40.672.183.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMK dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I ****	Angka	N/A	119	119	33.828.666.000	119	34.692.666.000	119	34.692.666.000	119	36.579.541.000	119	40.672.183.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan I																	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan *****							33.828.666.000		34.692.666.000		34.692.666.000		36.579.541.000		40.672.183.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	119	300.000.000	119	300.000.000	119	300.000.000	119	300.000.000	119	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK *****	Siswa	27929	28714	25372	6.992.350.000	25372	7.856.350.000	25372	7.856.350.000	25372	7.856.350.000	25372	7.856.350.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP *****	Orang	626	734	321	26.536.316.000	321	26.536.316.000	321	26.536.316.000	321	28.423.191.000	321	32.515.833.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khus								3.325.880.000		3.325.880.000		3.325.880.000		3.524.505.000		3.955.322.000	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				us ****																	DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Terwujudnya satuan pendidikan SLB dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I ****	Angka	N/A	17	17	3.325.880.000	17	3.325.880.000	17	3.325.880.000	17	3.524.505.000	17	3.955.322.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.00 51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus *****							3.325.880.000		3.325.880.000		3.325.880.000		3.524.505.000		3.955.322.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	24	24	17	150.000.000	17	150.000.000	17	150.000.000	17	150.000.000	17	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB *****	Siswa	1094	1094	765	382.500.000	765	382.500.000	765	382.500.000	765	382.500.000	765	382.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP *****	Orang	77	87	51	2.793.380.000	51	2.793.380.000	51	2.793.380.000	51	2.992.005.000	51	3.422.822.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Pendidikan Khusus															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									106.448.373.000		107.960.373.000		107.960.373.000		114.603.730.000		129.076.995.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II ***	%	69,22	70,5	71,78	0	73,07	0	74,35	0	75,64	0	76,92	0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMA kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin II ****	Angka	2642	2687	2732	0	2777	0	2822	0	2867	0	2912	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.01.00010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Dibangun *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	6	80	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sekolah *****																S WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.01.00036			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.01.00041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Paket	2	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersedia *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	2	2	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya sarpras pendidikan SMK kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin II ****	Angka	4526	4571	4616	0	4661	0	4706	0	4751	0	4796	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN II		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0		0		0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0		0		0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					RUAN		
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Direhabilitasi *****														MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	67	69	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	2	2	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN II		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	3	23	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya sarpras pendidikan SLB kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin II ****	Angka	158	168	178	0	188	0	198	0	208	0	218	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan II															DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilit	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						sedang/berat	asi sedang/berat *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																S WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
						Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II ***	%	85,94	71,97	73,3	70.000.000	75,14	70.000.000	76,78	70.000.000	78,95	40.900.000	79,15	40.900.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMA di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II ****	Angka	N/A	105	105	30.000.000	105	30.000.000	105	30.000.000	105	18.000.000	105	18.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	55	55	30.000.000	55	30.000.000	55	30.000.000	55	18.000.000	55	18.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pend								30.000.000		30.000.000		30.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				idikan Sekolah Menengah Kejuruan ****																	- CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II ****	Angka	N/A	128	128	30.000.000	128	30.000.000	128	30.000.000	128	18.000.000	128	18.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencega							30.000.000		30.000.000		30.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					han perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****																PENDIDIKAN II		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	105	105	30.000.000	105	30.000.000	105	30.000.000	105	18.000.000	105	18.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		4.900.000		4.900.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II ****	Angka	N/A	21	21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000	21	4.900.000	21	4.900.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		4.900.000		4.900.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	4.900.000	2	4.900.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II ***	%	83,3	83,8	83,8	106.378.373.000	84,3	107.890.373.000	84,7	107.890.373.000	84,7	114.562.830.000	85	129.036.095.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah								51.759.248.000		52.623.248.000		52.623.248.000		56.066.781.000		63.535.824.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Menengah Atas ****																	S WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMA dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II ****	Angka	N/A	105	105	51.759.248.000	105	52.623.248.000	105	52.623.248.000	105	56.066.781.000	105	63.535.824.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas *****							51.759.248.000		52.623.248.000		52.623.248.000		56.066.781.000		63.535.824.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	55	105	105	200.000.000	105	200.000.000	105	200.000.000	105	200.000.000	105	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA *****	Siswa	N/A	16168	16168	3.130.650.000	16168	3.994.650.000	16168	3.994.650.000	16168	3.994.650.000	16168	3.994.650.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	519	449	48.428.598.000	449	48.428.598.000	449	48.428.598.000	449	51.872.131.000	449	59.341.174.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Menengah Atas															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								49.605.809.000		50.253.809.000		50.253.809.000		53.180.619.000		59.529.556.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMK dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II ****	Angka	N/A	128	128	49.605.809.000	128	50.253.809.000	128	50.253.809.000	128	53.180.619.000	128	59.529.556.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan II																	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan *****							49.605.809.000		50.253.809.000		50.253.809.000		53.180.619.000		59.529.556.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	128	128	200.000.000	128	200.000.000	128	200.000.000	128	200.000.000	128	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK *****	Siswa	N/A	23960	35020	8.239.750.000	35020	8.887.750.000	35020	8.887.750.000	35020	8.887.750.000	35020	8.887.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	414	429	41.166.059.000	429	41.166.059.000	429	41.166.059.000	429	44.092.869.000	429	50.441.806.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								5.013.316.000		5.013.316.000		5.013.316.000		5.315.430.000		5.970.715.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terwujudnya satuan pendidikan SLB dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II ****	Angka	N/A	21	21	5.013.316.000	21	5.013.316.000	21	5.013.316.000	21	5.315.430.000	21	5.970.715.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus *****							5.013.316.000		5.013.316.000		5.013.316.000		5.315.430.000		5.970.715.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	2	21	21	100.000.000	21	100.000.000	21	100.000.000	21	100.000.000	21	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB *****	Siswa	N/A	N/A	1329	664.500.000	1329	664.500.000	1329	664.500.000	1329	664.500.000	1329	664.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KENDAL KOTA SEMARANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	75	4.248.816.000	75	4.248.816.000	75	4.248.816.000	75	4.550.930.000	75	5.206.215.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Pendidikan Khusus															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									92.286.052.000		84.608.204.000		85.968.204.000		91.822.373.000		102.321.865.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III ***	%	68,21	69,55	70,89	10.143.848.000	72,23	1.170.000.000.000	73,58	2.370.000.000.000	74,92	3.370.000.000.000	76,26	3.370.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								9.073.848.000		500.000.000		300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMA kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin III ****	Angka	1667	1707	1747	9.073.848.000	1787	500.000.000	1827	300.000.000	1867	1.300.000.000	1907	1.300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.01.00010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Dibangun *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah *****							8.773.848.000		200.000.000		0		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	3	20	8.773.848.000	1	200.000.000	N/A	0	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sekolah *****																S WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.01.00036			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersedia *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								770.000.000		370.000.000		1.770.000.000		1.770.000.000		1.770.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya sarpras pendidikan SMK kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin III ****	Angka	4511	4551	4591	770.000.000	4631	370.000.000	4671	1.770.000.000	4711	1.770.000.000	4751	1.770.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN III		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					RUAN		
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Direhabilitasi *****														MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah *****							170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	1	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							200.000.000		200.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	1	3	200.000.000	3	200.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah *****							400.000.000		0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN III		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	5	400.000.000	5	0	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya sarpras pendidikan SLB kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin III ****	Angka	123	133	143	300.000.000	153	300.000.000	163	300.000.000	173	300.000.000	183	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan III															DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.00004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.03.00008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilit	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						sedang/berat	asi sedang/berat *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Unit	N/A	N/A	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																S WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
						Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III ***	%	81,11	72,69	74,41	70.000.000	76,21	70.000.000	77,51	230.000.000	78,77	255.000.000	80,1	280.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								30.000.000		30.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMA di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III ****	Angka	N/A	71	71	30.000.000	71	30.000.000	71	90.000.000	71	100.000.000	71	110.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.00065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		30.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000	4	110.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pend								30.000.000		30.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				idikan Sekolah Menengah Kejuruan ****																	- CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III ****	Angka	N/A	124	124	30.000.000	124	30.000.000	124	90.000.000	124	100.000.000	124	110.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencega							30.000.000		30.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					han perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****																PENDIDIKAN III		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000	4	110.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III ****	Angka	N/A	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							10.000.000		10.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III ***	%	70,41	70,43	70,5	82.072.204.000	70,55	83.368.204.000	70,6	83.368.204.000	70,7	88.197.373.000	70,8	98.671.865.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah								37.043.513.000		37.691.513.000		37.691.513.000		40.116.288.000		45.375.631.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Menengah Atas ****																	SWILAYAH PENDIDIKAN III		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMA dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III ****	Angka	N/A	71	71	37.043.513.000	71	37.691.513.000	71	37.691.513.000	71	40.116.288.000	71	45.375.631.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas *****							37.043.513.000		37.691.513.000		37.691.513.000		40.116.288.000		45.375.631.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	56	71	71	300.000.000	71	300.000.000	71	300.000.000	71	300.000.000	71	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA *****	Siswa	N/A	7568	12361	2.642.400.000	12361	3.290.400.000	12361	3.290.400.000	12361	3.290.400.000	12361	3.290.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	470	34.101.113.000	470	34.101.113.000	470	34.101.113.000	470	36.525.888.000	470	41.785.231.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Menengah Atas															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								40.688.612.000		41.336.612.000		41.336.612.000		43.454.161.000		48.047.142.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMK dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III ****	Angka	N/A	124	124	40.688.612.000	124	41.336.612.000	124	41.336.612.000	124	43.454.161.000	124	48.047.142.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan III																	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan *****							40.688.612.000		41.336.612.000		41.336.612.000		43.454.161.000		48.047.142.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	124	300.000.000	124	300.000.000	124	300.000.000	124	300.000.000	124	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK *****	Siswa	N/A	36927	43465	10.608.150.000	43465	11.256.150.000	43465	11.256.150.000	43465	11.256.150.000	43465	11.256.150.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III JEPARA KUDUS PATI	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	464	29.780.462.000	464	29.780.462.000	464	29.780.462.000	464	31.898.011.000	464	36.490.992.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								4.340.079.000		4.340.079.000		4.340.079.000		4.626.924.000		5.249.092.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terwujudnya satuan pendidikan SLB dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III ****	Angka	N/A	10	10	4.340.079.000	10	4.340.079.000	10	4.340.079.000	10	4.626.924.000	10	5.249.092.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus *****							4.340.079.000		4.340.079.000		4.340.079.000		4.626.924.000		5.249.092.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB *****	Siswa	N/A	412	412	206.000.000	412	206.000.000	412	206.000.000	412	206.000.000	412	206.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	JEPARA KUDUS PATI	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	85	4.034.079.000	85	4.034.079.000	85	4.034.079.000	85	4.320.924.000	85	4.943.092.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Pendidikan Khusus															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									68.635.159.000		72.035.659.000		70.865.659.000		80.842.822.000		80.799.072.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV ***	%	53,04	55,43	57,82	1.861.500.000	60,53	2.650.000.000	63,72	1.480.000.000	66,91	7.900.000.000	70,09	6.680.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								831.500.000		350.000.000		650.000.000		1.450.000.000		1.250.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMA kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IV ****	Angka	1357	1417	1477	831.500.000	1547	350.000.000	1627	650.000.000	1707	1.450.000.000	1787	1.250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.01.00010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							300.000.000		0		300.000.000		900.000.000		900.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	Unit	3	2	3	300.000.000	3	0	3	300.000.000	3	900.000.000	3	900.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Dibangun *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	3	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							181.500.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	1	181.500.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sekolah *****																S WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.01.00036			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.01.00041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							200.000.000		0		0		200.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Paket	N/A	N/A	1	200.000.000	N/A	0	N/A	0	1	200.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersedia *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Laboratorium *****							0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	1	1	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								1.030.000.000		1.400.000.000		630.000.000		6.150.000.000		5.230.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya sarpras pendidikan SMK kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IV ****	Angka	1721	1781	1841	1.030.000.000	1911	1.400.000.000	1991	630.000.000	2071	6.150.000.000	2151	5.230.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	2	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN IV		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					RUAN		
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							300.000.000		0		300.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	4	9	10	300.000.000	10	0	10	300.000.000	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	9	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Direhabilitasi *****														MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah *****							330.000.000		0		330.000.000		1.250.000.000		330.000.000	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	1	8	1	330.000.000	5	0	1	330.000.000	5	1.250.000.000	1	330.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		300.000.000		0		300.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	2	N/A	4	0	4	300.000.000	4	0	4	300.000.000	4	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.00063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik *****							200.000.000		800.000.000		0		800.000.000		800.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	4	200.000.000	4	800.000.000	4	0	4	800.000.000	4	800.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.02.00069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							200.000.000		300.000.000		0		800.000.000		800.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN IV		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	1	200.000.000	8	300.000.000	8	0	8	800.000.000	8	800.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								0		900.000.000		200.000.000		300.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya sarpras pendidikan SLB kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin IV ****	Angka	103	133	163	0	193	900.000.000	233	200.000.000	273	300.000.000	313	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan IV															DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.00004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.03.00008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	1	N/A	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.03.00 40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		100.000.000		0		100.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Paket	N/A	1	N/A	0	1	100.000.000	N/A	0	1	100.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersedia *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		600.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																S WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	3	600.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
						Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV ***	%	66,1	49,6	50,5	70.000.000	55,76	40.000.000	58,89	40.000.000	60,89	40.000.000	70,77	40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								30.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMA di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV ****	Angka	N/A	72	72	30.000.000	72	15.000.000	72	15.000.000	72	15.000.000	72	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	1	1	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pend								30.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				idikan Sekolah Menengah Kejuruan ****																	- CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV ****	Angka	N/A	139	139	30.000.000	139	15.000.000	139	15.000.000	139	15.000.000	139	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencega							30.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					han perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****																PENDIDIKAN IV		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	1	1	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV ****	Angka	N/A	13	13	10.000.000	13	10.000.000	13	10.000.000	13	10.000.000	13	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV ***	%	70,56	70,56	70,56	66.703.659.000	71,12	69.345.659.000	71,68	69.345.659.000	72,24	72.902.822.000	72,8	74.079.072.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah								31.925.045.000		33.005.045.000		33.005.045.000		35.068.547.000		33.005.045.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Menengah Atas ****																	SWILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMA dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV ****	Angka	N/A	72	72	31.925.045.000	72	33.005.045.000	72	33.005.045.000	72	35.068.547.000	72	33.005.045.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas *****							31.925.045.000		33.005.045.000		33.005.045.000		35.068.547.000		33.005.045.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	58	58	72	300.000.000	72	300.000.000	72	300.000.000	72	300.000.000	72	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA *****	Siswa	N/A	9098	9314	2.604.750.000	9314	3.684.750.000	9314	3.684.750.000	9314	3.684.750.000	9314	3.684.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV GROBOGAN REMBANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	380	424	29.020.295.000	424	29.020.295.000	424	29.020.295.000	424	31.083.797.000	424	29.020.295.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	BLORA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Menengah Atas															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								31.895.455.000		33.407.455.000		33.407.455.000		34.735.036.000		37.614.565.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMK dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV ****	Angka	N/A	139	139	31.895.455.000	139	33.407.455.000	139	33.407.455.000	139	34.735.036.000	139	37.614.565.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan IV																	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan *****							31.895.455.000		33.407.455.000		33.407.455.000		34.735.036.000		37.614.565.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	139	300.000.000	139	300.000.000	139	300.000.000	139	300.000.000	139	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK *****	Siswa	N/A	N/A	43331	12.924.850.000	43331	14.436.850.000	43331	14.436.850.000	43331	14.436.850.000	43331	14.436.850.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV GROBOGAN REMBANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	297	18.670.605.000	297	18.670.605.000	297	18.670.605.000	297	19.998.186.000	297	22.877.715.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV GROBOGAN REMBANG	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								2.883.159.000		2.933.159.000		2.933.159.000		3.099.239.000		3.459.462.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terwujudnya satuan pendidikan SLB dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV ****	Angka	N/A	13	13	2.883.159.000	13	2.933.159.000	13	2.933.159.000	13	3.099.239.000	13	3.459.462.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus *****							2.733.159.000		2.733.159.000		2.733.159.000		2.899.239.000		3.259.462.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB *****	Siswa	N/A	595	595	297.500.000	595	297.500.000	595	297.500.000	595	297.500.000	595	297.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	51	2.335.659.000	51	2.335.659.000	51	2.335.659.000	51	2.501.739.000	51	2.861.962.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Pendidikan Khusus															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Unit	3	N/A	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									71.814.829.000		73.098.459.000		73.348.459.000		77.719.063.000		87.198.905.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V ***	%	57,35	59,12	61,24	1.494.370.000	63,89	1.050.000.000	66,54	1.200.000.000	69,19	1.200.000.000	71,84	1.200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah								594.370.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Menengah Atas ****																	SWIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMA kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin V ****	Angka	1296	1341	139	594.370.000	145	650.000.000	152	700.000.000	158	700.000.000	165	700.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BOYOLALI KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Dibangun *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah *****							200.000.000		300.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	2	200.000.000	2	300.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																SWIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.01.00036			Pengadaan Mebel Sekolah *****							194.370.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	1	3	194.370.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BOYOLALI KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.00068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							200.000.000		250.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	2	200.000.000	1	250.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.01.00070			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								750.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMK kondisi baik di Cabang Dinas	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin V ****	Angka	2770	2815	2865	750.000.000	2930	400.000.000	2995	500.000.000	3060	500.000.000	3125	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan V															KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.02.00004			Pembangunan Ruang Praktik							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan -		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Siswa *****																CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.02.00006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN V		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BOYOLALI KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.02.00028			Pengadaan Mebel Sekolah *****							150.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	1	150.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							400.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta	Jumlah Alat Praktik dan Peraga	Paket	N/A	N/A	3	400.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH	BOYOLALI KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Didik yang Tersedia	Peserta Didik yang Tersedia *****														MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan -		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Didik *****																CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							200.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	67	1	200.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								150.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya sarpras pendidikan SLB kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin V ****	Angka	137	147	167	150.000.000	187	0	207	0	227	0	247	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWIAYAH PENDIDIKAN V		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V KLATEN	
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilit	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BOYOLALI KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						sedang/berat	asi sedang/berat *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							150.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Unit	N/A	N/A	1	150.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																SWIAYAH PENDIDIKAN V		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
						Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V ***	%	72,87	58,48	60,1	70.000.000	62,9	70.000.000	65,8	170.000.000	70,31	170.000.000	71,79	170.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								30.000.000		30.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMA di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V ****	Angka	N/A	54	54	30.000.000	54	30.000.000	54	60.000.000	54	60.000.000	54	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		30.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	2	30.000.000	2	30.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pend								30.000.000		30.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				idikan Sekolah Menengah Kejuruan ****																	- CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V ****	Angka	N/A	90	90	30.000.000	90	30.000.000	90	60.000.000	90	60.000.000	90	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencega							30.000.000		30.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					han perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****																PENDIDIKAN V		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V ****	Angka	N/A	25	25	10.000.000	25	10.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							10.000.000		10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI KLATEN	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V ***	%	78,9	78,9	79	70.250.459.000	79,21	71.978.459.000	79,57	71.978.459.000	79,88	76.349.063.000	80,13	85.828.905.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah								33.175.182.000		33.607.182.000		33.607.182.000		35.852.029.000		40.721.100.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Menengah Atas ****																	SWIAYAH PENDIDIKAN V		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMA dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V ****	Angka	N/A	54	54	33.175.182.000	54	33.607.182.000	54	33.607.182.000	54	35.852.029.000	54	40.721.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas *****							33.175.182.000		33.607.182.000		33.607.182.000		35.852.029.000		40.721.100.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	54	200.000.000	54	200.000.000	54	200.000.000	54	200.000.000	54	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V KLATEN	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA *****	Siswa	N/A	N/A	5557	1.404.550.000	5557	1.836.550.000	5557	1.836.550.000	5557	1.836.550.000	5557	1.836.550.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V KLATEN	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	447	31.570.632.000	447	31.570.632.000	447	31.570.632.000	447	33.815.479.000	447	38.684.550.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	BOYOLALI CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Menengah Atas															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								35.888.365.000		37.184.365.000		37.184.365.000		39.282.823.000		43.834.384.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMK dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V ****	Angka	N/A	90	90	35.888.365.000	90	37.184.365.000	90	37.184.365.000	90	39.282.823.000	90	43.834.384.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan V																	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan *****							35.888.365.000		37.184.365.000		37.184.365.000		39.282.823.000		43.834.384.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	90	200.000.000	90	200.000.000	90	200.000.000	90	200.000.000	90	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK *****	Siswa	N/A	N/A	24423	6.176.450.000	24423	7.472.450.000	24423	7,472.450.000	24423	7.472.450.000	24423	7.472.450.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V KLATEN	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	464	29.511.915.000	464	29.511.915.000	464	29.511.915.000	464	31.610.373.000	464	36.161.934.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V KLATEN	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								1.186.912.000		1.186.912.000		1.186.912.000		1.214.211.000		1.273.421.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terwujudnya satuan pendidikan SLB dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V ****	Angka	N/A	25	25	1.186.912.000	25	1.186.912.000	25	1.186.912.000	25	1.214.211.000	25	1.273.421.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus *****							1.186.912.000		1.186.912.000		1.186.912.000		1.214.211.000		1.273.421.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V KLATEN	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB *****	Siswa	N/A	N/A	1406	703.000.000	1406	703.000.000	1406	703.000.000	1406	703.000.000	1406	703.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BOYOLALI CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V KLATEN	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	5	383.912.000	5	383.912.000	5	383.912.000	5	411.211.000	5	470.421.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	BOYOLALI CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Pendidikan Khusus															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									82.898.191.000		83.364.191.000		83.324.191.000		88.248.076.000		98.975.515.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI ***	%	89,52	89,71	89,9	1.440.000.000	90,09	610.000.000	90,28	610.000.000	90,47	610.000.000	90,66	610.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMA kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VI ****	Angka	1740	1745	1750	230.000.000	1755	230.000.000	1760	230.000.000	1765	230.000.000	1770	230.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.01.00010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Dibangun *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah *****							230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sekolah *****																S WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.01.00036			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.01.00041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersedia *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								1.210.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya sarpras pendidikan SMK kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VI ****	Angka	3107	3110	313	1.210.000.000	316	380.000.000	319	380.000.000	322	380.000.000	325	380.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							550.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN VI		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	1	550.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Direhabilitasi *****														KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan -		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	1	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							130.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	1	N/A	2	130.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							150.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	150.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN VI		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	2	1	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya sarpras pendidikan SLB kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VI ****	Angka	355	358	361	0	364	0	367	0	370	0	373	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan VI															DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.00 03			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.00004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.03.00008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.03.00 40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilit	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						sedang/berat	asi sedang/berat *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																S WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
						Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI ***	%	77,6	65,05	68,2	70.000.000	70,65	70.000.000	72,77	30.000.000	76,89	15.000.000	80,03	30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								30.000.000		30.000.000		15.000.000		0		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMA di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI ****	Angka	N/A	62	62	30.000.000	62	30.000.000	62	15.000.000	62	0	62	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		30.000.000		15.000.000		0		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	15.000.000	2	0	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pend								30.000.000		30.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				idikan Sekolah Menengah Kejuruan ****																	- CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI ****	Angka	N/A	129	129	30.000.000	129	30.000.000	129	0	129	0	129	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencega							30.000.000		30.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					han perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****																PENDIDIKAN VI		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI ****	Angka	N/A	29	29	10.000.000	29	10.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI ***	%	79,82	82,81	83,05	81.388.191.000	83,27	82.684.191.000	83,44	82.684.191.000	83,62	87.623.076.000	83,89	98.335.515.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah								34.411.936.000		35.059.936.000		35.059.936.000		37.379.413.000		42.410.357.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Menengah Atas ****																	S WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMA dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI ****	Angka	N/A	62	62	34.411.936.000	62	35.059.936.000	62	35.059.936.000	62	37.379.413.000	62	42.410.357.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas *****							34.411.936.000		35.059.936.000		35.059.936.000		37.379.413.000		42.410.357.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	100	N/A	62	300.000.000	62	300.000.000	62	300.000.000	62	300.000.000	62	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA *****	Siswa	N/A	N/A	52666	1.491.750.000	52666	2.139.750.000	52666	2.139.750.000	52666	2.139.750.000	52666	2.139.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	434	32.620.186.000	434	32.620.186.000	434	32.620.186.000	434	34.939.663.000	434	39.970.607.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Menengah Atas															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								43.283.926.000		43.931.926.000		43.931.926.000		46.351.894.000		51.600.805.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMK dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI ****	Angka	N/A	129	129	43.283.926.000	129	43.931.926.000	129	43.931.926.000	129	46.351.894.000	129	51.600.805.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan VI																	
		1.01.02.1.02.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.02.00005			Pembangunan Ruang Laborat							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					orium *****																- CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan *****							43.283.926.000		43.931.926.000		43.931.926.000		46.351.894.000		51.600.805.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	129	300.000.000	129	300.000.000	129	300.000.000	129	300.000.000	129	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Manajemen *****																
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK *****	Siswa	N/A	N/A	37479	8.950.450.000	37479	9.598.450.000	37479	9.598.450.000	37479	9.598.450.000	37479	9.598.450.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	544	34.033.476.000	544	34.033.476.000	544	34.033.476.000	544	36.453.444.000	544	41.702.355.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khus								3.692.329.000		3.692.329.000		3.692.329.000		3.891.769.000		4.324.353.000	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				us ****																	DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terwujudnya satuan pendidikan SLB dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI ****	Angka	N/A	29	29	3.692.329.000	29	3.692.329.000	29	3.692.329.000	29	3.891.769.000	29	4.324.353.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus *****							3.692.329.000		3.692.329.000		3.692.329.000		3.891.769.000		4.324.353.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	30	4	29	100.000.000	29	100.000.000	29	100.000.000	29	100.000.000	29	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB *****	Siswa	N/A	1575	1575	787.500.000	1575	787.500.000	1575	787.500.000	1575	787.500.000	1575	787.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	63	2.804.829.000	63	2.804.829.000	63	2.804.829.000	63	3.004.269.000	63	3.436.853.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Pendidikan Khusus															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									54.518.573.000		55.382.573.000		55.833.573.000		59.041.864.000		65.987.709.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII ***	%	100,9	67,53	68	800.000.000	68,25	800.000.000	70	1.200.000.000	72,5	800.000.000	75	800.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								200.000.000		200.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMA kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VII ****	Angka	1992	1994	1996	200.000.000	1998	200.000.000	2000	600.000.000	2002	600.000.000	2004	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.01.00010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Dibangun *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah *****							200.000.000		0		600.000.000		0		600.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	6	N/A	1	200.000.000	N/A	0	6	600.000.000	N/A	0	6	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sekolah *****																S WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.01.00036			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.01.00041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersedia *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		200.000.000		0		600.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	2	N/A	N/A	0	2	200.000.000	N/A	0	6	600.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								400.000.000		400.000.000		400.000.000		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya sarpras pendidikan SMK kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VII ****	Angka	2245	2247	2249	400.000.000	2251	400.000.000	2253	400.000.000	2255	0	2257	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN VII		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					RUAN		
		1.01.02.1.02.00010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.02.00016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Direhabilitasi *****														MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							400.000.000		400.000.000		400.000.000		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersediannya sarpras pendidikan SLB kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VII ****	Angka	1056	1058	1060	200.000.000	1062	200.000.000	1064	200.000.000	1066	200.000.000	1068	200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
		1.01.02.1.03.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Dibangun *****														WILAYAH PENDIDIKAN VII		
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/ berat							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****																- CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN VII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Unit	N/A	N/A	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilt	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pendidikan -	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						asi sedang/berat	Telah Direhabilitasi sedang berat *****														CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII ***	%	81,82	65,73	70,34	70.000.000	75,58	70.000.000	77,77	121.000.000	80,56	133.100.000	81,89	146.410.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								30.000.000		30.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SMA di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII ****	Angka	N/A	60	60	30.000.000	60	30.000.000	60	48.400.000	60	53.240.000	60	58.564.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		30.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	48.400.000	1	53.240.000	1	58.564.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								30.000.000		30.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII ****	Angka	N/A	81	81	30.000.000	81	30.000.000	81	48.400.000	81	53.240.000	81	58.564.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		30.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	48.400.000	1	53.240.000	1	58.564.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII ****	Angka	N/A	24	24	10.000.000	24	10.000.000	24	24.200.000	24	26.620.000	24	29.282.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							10.000.000		10.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII ***	%	85,55	85,6	86,2	53.648.573.000	86,8	54.512.573.000	87,4	54.512.573.000	88	58.108.764.000	88,6	65.041.299.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah								23.378.333.000		23.810.333.000		23.810.333.000		25.246.927.000		28.362.898.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Menengah Atas ****																	SWILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMA dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII ****	Angka	60	60	60	23.378.333.000	60	23.810.333.000	60	23.810.333.000	60	25.246.927.000	60	28.362.898.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas *****							23.378.333.000		23.810.333.000		23.810.333.000		25.246.927.000		28.362.898.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA *****	Siswa	N/A	N/A	16510	2.974.650.000	16510	3.406.650.000	16510	3.406.650.000	16510	3.406.650.000	16510	3.406.650.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	234	20.203.683.000	234	20.203.683.000	234	20.203.683.000	234	21.640.277.000	234	24.756.248.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Menengah Atas															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								28.015.204.000		28.447.204.000		28.447.204.000		30.501.775.000		34.090.540.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMK dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII ****	Angka	81	81	81	28.015.204.000	81	28.447.204.000	81	28.447.204.000	81	30.501.775.000	81	34.090.540.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan VII																	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan *****							28.015.204.000		28.447.204.000		28.447.204.000		30.101.775.000		33.690.540.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	81	200.000.000	81	200.000.000	81	200.000.000	81	200.000.000	81	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK *****	Siswa	N/A	N/A	20516	4.545.950.000	20516	4.977.950.000	20516	4.977.950.000	20516	4.977.950.000	20516	4.977.950.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	259	23.269.254.000	259	23.269.254.000	259	23.269.254.000	259	24.923.825.000	259	28.512.590.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02.1.02.00069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		400.000.000		400.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	4	400.000.000	4	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								2.255.036.000		2.255.036.000		2.255.036.000		2.360.062.000		2.587.861.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Terwujudnya satuan pendidikan SLB dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII ****	Angka	24	24	24	2.255.036.000	24	2.255.036.000	24	2.255.036.000	24	2.360.062.000	24	2.587.861.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen							2.255.036.000		2.255.036.000		2.255.036.000		2.360.062.000		2.587.861.000	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sekolah Pendidikan Khusus *****																DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB *****	Siswa	N/A	N/A	156	678.000.000	156	678.000.000	156	678.000.000	156	678.000.000	156	678.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	36	1.477.036.000	36	1.477.036.000	36	1.477.036.000	36	1.582.062.000	36	1.809.861.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									54.258.868.000		56.672.868.000		57.848.868.000		61.901.437.000		68.491.817.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi	%	64,11	65,9	68,28	1.790.000.000	70,67	1.330.000.000	73,06	2.336.000.000	75,44	3.455.000.000	77,83	3.700.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan VIII	baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII ***														WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								790.000.000		530.000.000		1.336.000.000		2.255.000.000		2.500.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMA kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin VIII ****	Angka	1400	1440	1490	790.000.000	1540	530.000.000	1590	1.336.000.000	1640	2.255.000.000	1690	2.500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIASA		
		1.01.02.1.01.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.01.00019			Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah *****							400.000.000		200.000.000		0		800.000.000		900.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	4	400.000.000	2	200.000.000	N/A	0	4	800.000.000	4	900.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.01.00020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		726.000.000		800.000.000		900.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilit	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	4	726.000.000	4	800.000.000	4	900.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Sedang/Berat	asi Sedang/Berat *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		165.000.000		180.000.000		200.000.000		220.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	1	165.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah *****							40.000.000		0		50.000.000		55.000.000		60.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	1	40.000.000	N/A	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							100.000.000		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	1	1	100.000.000	N/A	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.01.00068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							100.000.000		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	1	1	100.000.000	N/A	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium *****							150.000.000		165.000.000		180.000.000		200.000.000		220.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	1	150.000.000	1	165.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								750.000.000		450.000.000		550.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMK kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VIII ****	Angka	1586	1626	1676	750.000.000	1726	450.000.000	1776	550.000.000	1826	750.000.000	1876	750.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN VIII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.02.00004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00005			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							150.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	1	150.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.02.00006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MEN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terbangun	yang Telah Dibangun *****														ENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium *****							150.000.000		0		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	1	150.000.000	N/A	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terehabilitasi	yang Telah Direhabilitasi *****														MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah *****							100.000.000		100.000.000		0		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	N/A	0	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta							100.000.000		100.000.000		0		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Didik *****																NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	N/A	0	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/ berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							150.000.000		0		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	1	150.000.000	N/A	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								250.000.000		350.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersediannya sarpras pendidikan SLB kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VIII ****	Angka	43	53	73	250.000.000	93	350.000.000	113	450.000.000	133	450.000.000	153	450.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	Unit	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Dibangun *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang /Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sekolah *****																SWILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.00080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilit	Ruang	N/A	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						sedang/berat	asi sedang/berat *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
						Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII ***	%	86,14	80,68	81,8	70.000.000	83,3	70.000.000	85,65	90.000.000	87,84	105.000.000	88,75	120.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SMA di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin vIII ****	Angkatan	N/A	67	67	30.000.000	67	30.000.000	67	30.000.000	67	35.000.000	67	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII ****	Angka	N/A	84	84	30.000.000	84	30.000.000	84	30.000.000	84	35.000.000	84	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII ****	Angka	N/A	8	8	10.000.000	8	10.000.000	8	30.000.000	8	35.000.000	8	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							10.000.000		10.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII ***	%	76,12	76,12	76,3	52.398.868.000	76,5	55.272.868.000	76,8	55.422.868.000	76,9	58.341.437.000	77	64.671.817.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah								26.860.271.000		28.588.271.000		28.588.271.000		30.267.892.000		33.910.990.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Menengah Atas ****																	SWILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMA dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII ****	Angkatan	N/A	67	67	26.860.271.000	67	28.588.271.000	67	28.588.271.000	67	30.267.892.000	67	33.910.990.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas *****							26.860.271.000		28.588.271.000		28.588.271.000		30.267.892.000		33.910.990.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	67	300.000.000	67	300.000.000	67	300.000.000	67	300.000.000	67	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA *****	Siswa	N/A	N/A	9612	2.938.750.000	9612	4.666.750.000	9612	4.666.750.000	9612	4.666.750.000	9612	4.666.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	299	23.621.521.000	299	23.621.521.000	299	23.621.521.000	299	25.301.142.000	299	28.944.240.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Menengah Atas															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								24.230.690.000		25.376.690.000		25.526.690.000		26.698.022.000		29.238.649.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMK dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII ****	Angka	N/A	84	84	24.230.690.000	84	25.376.690.000	84	25.526.690.000	84	26.698.022.000	84	29.238.649.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan VIII																	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik *****	Peserta Didik	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan *****							24.080.690.000		25.376.690.000		25.376.690.000		26.548.022.000		29.088.649.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Terlaksanaanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	19	19	84	300.000.000	84	300.000.000	84	300.000.000	84	300.000.000	84	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
						Terlaksanaanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK *****	Siswa	39458	41393	30113	7.307.500.000	30113	8.603.500.000	30113	8.603.500.000	30113	8.603.500.000	30113	8.603.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					RUAN		
						Terlaksanaanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP *****	Orang	509	377	251	16.473.190.000	251	16.473.190.000	251	16.473.190.000	251	17.644.522.000	251	20.185.149.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.02.00069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							150.000.000		0		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilit	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang	Ruang	N/A	N/A	1	150.000.000	N/A	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII KOTA MAGELANG MAG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						asi sedang/berat	Telah Direhabilitasi sedang/berat *****														MENENGAH KEJURUAN	ELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								1.307.907.000		1.307.907.000		1.307.907.000		1.375.523.000		1.522.178.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Terwujudnya satuan pendidikan SLB dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII ****	Angka	N/A	8	8	1.307.907.000	8	1.307.907.000	8	1.307.907.000	8	1.375.523.000	8	1.522.178.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus *****							1.307.907.000		1.307.907.000		1.307.907.000		1.375.523.000		1.522.178.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB *****	Siswa	N/A	N/A	514	257.000.000	514	257.000.000	514	257.000.000	514	257.000.000	514	257.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan Khusus															ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	17	950.907.000	17	950.907.000	17	950.907.000	17	1.018.523.000	17	1.165.178.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									110.680.536.000		110.996.786.000		112.246.786.000		119.877.901.000		133.176.293.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX ***	%	67,62	68,66	70,06	5.687.900.000	71,45	1.000.000.000	72,84	2.250.000.000	74,23	3.750.000.000	75,63	3.750.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								1.700.000.000		400.000.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMA kondisi baik di Cabang Dinas	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin IX ****	Angka	1959	1999	2049	1.700.000.000	2089	400.000.000.000	2139	1.200.000.000	2129	1.200.000.000	2179	1.200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan IX															ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PUREWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.01.00019			Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah *****							400.000.000		0		800.000.000		800.000.000		800.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	2	400.000.000	N/A	0	4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilit	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Sedang/Berat	asi Sedang/Berat *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah *****							300.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	1	300.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PUROREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							1.000.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	30	1.000.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PUROWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.01.00068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PUREWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BANJARNEGARA KEBUMEN PUREWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium *****							0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								3.503.900.000		400.000.000		850.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMK kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin IX ****	Angka	6136	6176	6226	3.503.900.000	6276	400.000.000	6326	850.000.000	6316	2.350.000.000	6366	2.350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN IX		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa *****							1.309.500.000		0		0		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	1	1.309.500.000	1	0	1	0	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00005			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.02.00006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							294.400.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	1	294.400.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PUREWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MEN	BANJARNEGARA KEBUMEN PUREWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terbangun	yang Telah Dibangun *****														ENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium *****							0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terehabilitasi	yang Telah Direhabilitasi *****														MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah *****							300.000.000		0		450.000.000		450.000.000		450.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	3	300.000.000	N/A	0	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta							1.000.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Didik *****																NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	26	1.000.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/ berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik *****							600.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	2	600.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								484.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN IX		
						Tersediannya sarpras pendidikan SLB kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin IX ****	Angka	752	762	782	484.000.000	802	200.000.000	822	200.000.000	842	200.000.000	862	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/T	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX KEBUMEN<br	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terbangun	U yang Telah Dibangun *****														MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	>PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIASA		
		1.01.02.1.03.00008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							184.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	1	184.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							300.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	8	300.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Unit Kesehatan							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sekolah *****																S WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.03.00069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilit	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							asi sedang berat *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX ***	%	86,94	78,17	79,3	70.000.000	80,12	100.000.000	84,45	100.000.000	85,98	100.000.000	86,75	100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SMA di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX ****	Angka	N/A	75	75	30.000.000	75	40.000.000	75	40.000.000	75	40.000.000	75	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX ****	Angka	N/A	161	161	30.000.000	161	40.000.000	161	40.000.000	161	40.000.000	161	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX ****	Angka	N/A	15	15	10.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX ***	%	88,13	88,14	88,15	104.922.636.000	88,16	109.896.786.000	88,17	109.896.786.000	88,18	116.027.901.000	88,19	129.326.293.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah								46.720.687.000		48.244.687.000		48.244.687.000		51.375.763.000		58.167.075.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Menengah Atas ****																	S WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMA dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX ****	Angka	N/A	75	75	46.720.687.000	75	48.244.687.000	75	48.244.687.000	75	51.375.763.000	75	58.167.075.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas *****							46.720.687.000		48.244.687.000		48.244.687.000		51.375.763.000		58.167.075.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	75	388.000.000	75	400.000.000	75	400.000.000	75	400.000.000	75	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PUREWOREJO WONOSOBO	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA *****	Siswa	N/A	N/A	6379	2.298.450.000	6379	3.810.450.000	6379	3.810.450.000	6379	3.810.450.000	6379	3.810.450.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PUREWOREJO WONOSOBO	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	593	44.034.237.000	593	44.034.237.000	593	44.034.237.000	593	47.165.313.000	593	53.956.625.000	SEKSI SEKOLAH MENENG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Menengah Atas															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								54.566.423.000		58.059.423.000		58.059.423.000		60.856.334.000		66.922.836.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMK dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX ****	Angka	N/A	161	161	54.566.423.000	161	58.059.423.000	161	58.059.423.000	161	60.856.334.000	161	66.922.836.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan IX																	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan *****							54.566.423.000		58.059.423.000		58.059.423.000		60.856.334.000		66.922.836.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	161	579.000.000	161	400.000.000	161	400.000.000	161	400.000.000	161	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK *****	Siswa	N/A	N/A	54468	14.652.750.000	54468	18.324.750.000	54468	18.324.750.000	54468	18.324.750.000	54468	18.324.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	627	39.334.673.000	627	39.334.673.000	627	39.334.673.000	627	42.131.584.000	627	48.198.086.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								3.635.526.000		3.592.676.000		3.592.676.000		3.795.804.000		4.236.382.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terwujudnya satuan pendidikan SLB dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX ****	Angka	N/A	15	15	3.635.526.000	15	3.592.676.000	15	3.592.676.000	15	3.795.804.000	15	4.236.382.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus *****							3.635.526.000		3.592.676.000		3.592.676.000		3.795.804.000		4.236.382.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	15	242.850.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PUREWOREJO WONOSOBO	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB *****	Siswa	N/A	N/A	1072	536.000.000	1072	536.000.000	1072	536.000.000	1072	536.000.000	1072	536.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANJARNEGARA KEBUMEN PUREWOREJO WONOSOBO	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	53	2.856.676.000	53	2.856.676.000	53	2.856.676.000	53	3.059.804.000	53	3.500.382.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	BANJARNEGARA KEBUMEN PUREWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Pendidikan Khusus															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									126.926.608.000		127.655.330.000		128.098.330.000		135.737.094.000		147.675.836.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Meningkatnya kualitas sarpras Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X ***	%	65,52	66,41	67,59	8.565.278.000	68,78	3.246.000.000	69,97	3.600.000.000	71,15	4.640.000.000	72,34	2.250.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								3.500.000.000		1.231.000.000		2.950.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMA kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin X ****	Angka	1993	2033	2083	3.500.000.000	2133	1.231.000.000	2183	2.950.000.000	2233	1.500.000.000	2283	1.500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		450.000.000		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	450.000.000	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.01.00010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		75.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	1	75.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		306.000.000		150.000.000		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	Unit	N/A	N/A	N/A	0	13	306.000.000	2	150.000.000	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Dibangun *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah *****							2.200.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	70	2.200.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		750.000.000		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	5	750.000.000	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan							0		120.000.000		100.000.000		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sekolah *****																SWILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	6	120.000.000	10	100.000.000	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.01.00036			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							1.000.000.000		250.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Paket	N/A	N/A	6	1.000.000.000	6	250.000.000	6	1.500.000.000	6	1.500.000.000	6	1.500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersedia *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		30.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	31	30.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							300.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	2	300.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Laboratorium *****							0		450.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	450.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								4.925.278.000		2.015.000.000		450.000.000		3.000.000.000		750.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya sarpras pendidikan SMK kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin X ****	Angka	1291	1331	1381	4.925.278.000	1431	2.015.000.000	1481	450.000.000	1531	3.000.000.000	1581	750.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		450.000.000		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	450.000.000	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa *****							0		900.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	7	900.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN X		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		75.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	1	75.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					RUAN		
		1.01.02.1.02.00010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		80.000.000		0		3.000.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	4	80.000.000	N/A	0	2	3.000.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.02.00016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Direhabilitasi *****														MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							720.000.000		0		0		0		750.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	720.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	750.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		210.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	21	210.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik *****							0		750.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	15	750.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Kelas Sekolah *****							4.205.278.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN X		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	4.205.278.000	16	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								140.000.000		0		200.000.000		140.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya sarpras pendidikan SLB kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin X ****	Angka	128	138	158	140.000.000	178	0	198	200.000.000	218	140.000.000	238	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan X															DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.00 03			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.00004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.03.00008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		200.000.000		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN X		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	200.000.000	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X CILACAP	
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilit	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						sedang/berat	asi sedang/berat *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		140.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	140.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah							140.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																S WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	2	140.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
						Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X ***	%	88,12	78,55	79,13	70.000.000	80,12	70.000.000	83,56	159.000.000	84,71	159.000.000	86,88	175.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								30.000.000		30.000.000		66.000.000		66.000.000		74.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMA di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X ****	Angka	N/A	96	96	30.000.000	96	30.000.000	96	66.000.000	96	66.000.000	96	74.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		30.000.000		66.000.000		66.000.000		74.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	2	30.000.000	2	30.000.000	2	66.000.000	2	66.000.000	2	74.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pend								30.000.000		30.000.000		88.000.000		88.000.000		96.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				idikan Sekolah Menengah Kejuruan ****																	- CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X ****	Angka	N/A	181	181	30.000.000	181	30.000.000	181	88.000.000	181	88.000.000	181	96.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencega							30.000.000		30.000.000		88.000.000		88.000.000		96.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					han perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****																PENDIDIKAN X		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	146	30.000.000	146	30.000.000	146	88.000.000	146	88.000.000	146	96.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X ****	Angka	N/A	13	13	10.000.000	13	10.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							10.000.000		10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	10	10.000.000	10	10.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X ***	%	N/A	77,27	77,52	118.291.330.000	77,78	124.339.330.000	78,03	124.339.330.000	78,31	130.938.094.000	78,58	145.250.836.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah								51.654.211.000		53.598.211.000		53.598.211.000		56.969.695.000		64.282.453.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Menengah Atas ****																	SWILAYAH PENDIDIKAN X		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMA dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X ****	Angka	N/A	96	96	51.654.211.000	96	53.598.211.000	96	53.598.211.000	96	56.969.695.000	96	64.282.453.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas *****							51.654.211.000		53.598.211.000		53.598.211.000		56.969.695.000		64.282.453.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	96	300.000.000	96	300.000.000	96	300.000.000	96	300.000.000	96	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA *****	Siswa	N/A	10049	12954	3.938.950.000	12954	5.882.950.000	12954	5.882.950.000	12954	5.882.950.000	12954	5.882.950.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X CILACAP PURBALINGGA	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	665	47.415.261.000	665	47.415.261.000	665	47.415.261.000	665	50.786.745.000	665	58.099.503.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	BANYUMAS CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Menengah Atas															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								63.363.222.000		67.467.222.000		67.467.222.000		70.512.763.000		77.118.557.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMK dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X ****	Angka	N/A	181	181	63.363.222.000	181	67.467.222.000	181	67.467.222.000	181	70.512.763.000	181	77.118.557.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan X																	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan *****							63.363.222.000		67.467.222.000		67.467.222.000		70.512.763.000		77.118.557.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	181	400.000.000	181	400.000.000	181	400.000.000	181	400.000.000	181	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK *****	Siswa	N/A	N/A	81586	20.131.850.000	81586	24.235.850.000	81586	24.235.850.000	81586	24.235.850.000	81586	24.235.850.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	581	42.831.372.000	581	42.831.372.000	581	42.831.372.000	581	45.876.913.000	581	52.482.707.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								3.273.897.000		3.273.897.000		3.273.897.000		3.455.636.000		3.849.826.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terwujudnya satuan pendidikan SLB dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X ****	Angka	N/A	13	13	3.273.897.000	13	3.273.897.000	13	3.273.897.000	13	3.455.636.000	13	3.849.826.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus *****							3.273.897.000		3.273.897.000		3.273.897.000		3.455.636.000		3.849.826.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X CILACAP PURBALINGGA	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB *****	Siswa	N/A	1175	1236	618.000.000	1236	618.000.000	1236	618.000.000	1236	618.000.000	1236	618.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BANYUMAS CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X CILACAP PURBALINGGA	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	42	2.555.897.000	42	2.555.897.000	42	2.555.897.000	42	2.737.636.000	42	3.131.826.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	BANYUMAS CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Pendidikan Khusus															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									87.382.182.000		90.182.572.000		86.674.232.000		102.881.328.000		110.213.690.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI ***	%	66,34	67,47	68,98	4.303.450.000	70,49	5.380.840.000	72	1.850.000.000	73,51	13.598.450.000	75,02	11.260.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								750.000.000		1.790.000.000		500.000.000		890.000.000		250.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMA kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XI ****	Angka	1511	1551	1601	750.000.000	1651	1.790.000.000	1701	500.000.000	1751	890.000.000	1801	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.01.00010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		900.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	Unit	N/A	N/A	N/A	0	3	900.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Dibangun *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		640.000.000		0		640.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	2	6	N/A	0	4	640.000.000	N/A	0	4	640.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sekolah *****																S WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.01.00036			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.01.00041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersedia *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	2	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Laboratorium *****							500.000.000		0		250.000.000		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	1	N/A	2	500.000.000	N/A	0	1	250.000.000	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								3.553.450.000		3.080.000.000		1.200.000.000		12.558.450.000		10.860.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya sarpras pendidikan SMK kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XI ****	Angka	1291	1331	1381	3.553.450.000	1431	3.080.000.000	1481	1.200.000.000	1531	12.558.450.000	1581	10.860.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		300.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	1	300.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa *****							0		0		500.000.000		1.548.450.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	500.000.000	1	1.548.450.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN XI		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		400.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	2	400.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					RUAN		
		1.01.02.1.02.00010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		750.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	4	750.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.02.00016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		0		200.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	200.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah	Ruang	N/A	N/A	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Direhabilitasi *****														MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		300.000.000		0		300.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	2	300.000.000	N/A	0	2	300.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah *****							300.000.000		0		0		300.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	1	N/A	1	300.000.000	N/A	0	N/A	0	1	300.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							1.000.000.000		0		0		4.500.000.000		6.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	28	1.000.000.000	N/A	0	N/A	0	2	4.500.000.000	4	6.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		1.050.000.000		1.050.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	6	1.050.000.000	6	1.050.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.00063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik *****							573.450.000		400.000.000		200.000.000		990.000.000		990.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	5	573.450.000	2	400.000.000	1	200.000.000	1	990.000.000	1	990.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.02.00069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							1.380.000.000		1.380.000.000		0		2.070.000.000		2.070.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN XI		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	6	1.380.000.000	6	1.380.000.000	N/A	0	9	2.070.000.000	9	2.070.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								0		510.840.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya sarpras pendidikan SLB kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin XI ****	Angka	128	138	158	0	178	510.840.000	198	150.000.000	218	150.000.000	238	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan XI															DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.00004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.03.00008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		510.840.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	510.840.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.03.00 40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilit	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						sedang/berat	asi sedang/berat *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																S WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
						Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI ***	%	77,87	63,64	65,78	70.000.000	70,34	65.000.000	74,45	87.500.000	77,89	87.500.000	80,34	87.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								30.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMA di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI ****	Angka	N/A	70	70	30.000.000	70	25.000.000	70	25.000.000	70	25.000.000	70	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	2	2	30.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pend								30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				idikan Sekolah Menengah Kejuruan ****																	- CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin ****	Angka	N/A	177	177	30.000.000	177	30.000.000	177	50.000.000	177	50.000.000	177	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencega							30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					han perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****																PENDIDIKAN XI		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	2	30.000.000	2	30.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI ****	Angka	N/A	6	6	10.000.000	6	10.000.000	6	12.500.000	6	12.500.000	6	12.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							10.000.000		10.000.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	2	10.000.000	2	10.000.000	2	12.500.000	2	12.500.000	2	12.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI ***	%	75,32	77,99	79,25	83.008.732.000	80,62	84.736.732.000	82,5	84.736.732.000	83,75	89.195.378.000	85,62	98.866.190.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah								37.199.210.000		38.063.210.000		38.063.210.000		40.545.523.000		45.929.659.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Menengah Atas ****																	S WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMA dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI ****	Angka	N/A	70	70	37.199.210.000	70	38.063.210.000	70	38.063.210.000	70	40.545.523.000	70	45.929.659.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas *****							37.199.210.000		38.063.210.000		38.063.210.000		40.545.523.000		45.929.659.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	41	41	70	300.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA *****	Siswa	N/A	4722	67199	1.988.950.000	67199	2.852.950.000	67199	2.852.950.000	67199	2.852.950.000	67199	2.852.950.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	496	34.910.260.000	496	34.910.260.000	496	34.910.260.000	496	37.392.573.000	496	42.776.709.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Menengah Atas															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								43.305.588.000		44.169.588.000		44.169.588.000		45.992.338.000		49.945.891.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMK dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI ****	Angka	N/A	177	177	43.305.588.000	177	44.169.588.000	177	44.169.588.000	177	45.992.338.000	177	49.945.891.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan XI																	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan *****							43.305.588.000		44.169.588.000		44.169.588.000		45.992.338.000		49.945.891.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	177	300.000.000	177	300.000.000	177	300.000.000	177	300.000.000	177	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK *****	Siswa	N/A	N/A	65519	17.371.100.000	65519	18.235.100.000	65519	18.235.100.000	65519	18.235.100.000	65519	18.235.100.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	376	25.634.488.000	376	25.634.488.000	376	25.634.488.000	376	27.457.238.000	376	31.410.791.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								2.503.934.000		2.503.934.000		2.503.934.000		2.657.517.000		2.990.640.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terwujudnya satuan pendidikan SLB dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI ****	Angka	N/A	6	6	2.503.934.000	6	2.503.934.000	6	2.503.934.000	6	2.657.517.000	6	2.990.640.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus *****							2.503.934.000		2.503.934.000		2.503.934.000		2.657.517.000		2.990.640.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB *****	Siswa	N/A	N/A	488	244.000.000	488	244.000.000	488	244.000.000	488	244.000.000	488	244.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	45	2.159.934.000	45	2.159.934.000	45	2.159.934.000	45	2.313.517.000	45	2.646.640.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Pendidikan Khusus															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									97.207.318.000		89.237.539.000		90.833.539.000		104.216.871.000		114.046.371.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII ***	%	78,86	81,29	83,72	14.155.779.000	86,15	2.720.000.000	88,58	4.326.000.000	91,01	13.116.000.000	93,44	13.091.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								9.900.779.000		850.000.000		1.566.000.000		5.571.000.000		5.571.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersediannya sarpras pendidikan SMA kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XII ****	Angka	1178	1213	1248	9.900.779.000	1283	850.000.000	1318	1.566.000.000	1353	5.571.000.000	1388	5.571.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		0		66.000.000		66.000.000		66.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	2	66.000.000	2	66.000.000	2	66.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.01.00010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		255.000.000		255.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	255.000.000	3	255.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		250.000.000		250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.250.000.000	5	1.250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Dibangun *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah *****							6.650.779.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	20	6.650.779.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							450.000.000		0		450.000.000		450.000.000		450.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	3	450.000.000	N/A	0	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan							50.000.000		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sekolah *****																S WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	2	50.000.000	N/A	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.01.00036			Pengadaan Mebel Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							1.000.000.000		600.000.000		0		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Paket	N/A	N/A	5	1.000.000.000	3	600.000.000	N/A	0	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersedia *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		750.000.000		750.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	5	750.000.000	5	750.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							1.000.000.000		0		0		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	1	1.000.000.000	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Laboratorium *****							750.000.000		0		750.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Ruang	N/A	N/A	5	750.000.000	N/A	0	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								3.200.000.000		1.025.000.000		2.000.000.000		5.510.000.000		5.485.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya sarpras pendidikan SMK kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin XII ****	Angka	1291	1326	1361	3.200.000.000	1396	1.025.000.000	1431	2.000.000.000	1466	5.510.000.000	1501	5.485.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							0		400.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	1	400.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.00004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa *****							1.050.000.000		0		0		1.050.000.000		1.050.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	3	1.050.000.000	N/A	0	N/A	0	3	1.050.000.000	3	1.050.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.02.00005			Pembangunan Ruang Laboratorium *****							0		0		350.000.000		700.000.000		700.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN XII		
						Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	350.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.02.00006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		85.000.000		85.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	85.000.000	2	85.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					RUAN		
		1.01.02.1.02.00010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		350.000.000		0		700.000.000		700.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	350.000.000	N/A	0	2	700.000.000	2	700.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.02.00016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		100.000.000		0		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	1	100.000.000	N/A	0	2	200.000.000	2	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium *****							0		0		0		600.000.000		600.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	4	600.000.000	4	600.000.000	SEKSI SEKOLAH	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Direhabilitasi *****														MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0019			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		25.000.000		0		25.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	1	25.000.000	N/A	0	1	25.000.000	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah *****							500.000.000		0		0		500.000.000		500.000.000	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	2	500.000.000	N/A	0	N/A	0	2	500.000.000	2	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							750.000.000		0		750.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	3	750.000.000	N/A	0	3	750.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik *****							300.000.000		150.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi *****	Ruang	N/A	N/A	2	300.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							600.000.000		0		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN XII		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	3	600.000.000	N/A	0	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								1.055.000.000		845.000.000		760.000.000		2.035.000.000		2.035.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersediannya sarpras pendidikan SLB kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin XII ****	Angka	128	138	158	1.055.000.000	178	845.000.000	198	760.000.000	218	2.035.000.000	238	2.035.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan XII															DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.00003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *****							555.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	1	555.000.000	1	660.000.000	1	660.000.000	1	660.000.000	1	660.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.00004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		85.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	1	85.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.03.00008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							500.000.000		0		0		500.000.000		500.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun *****	Unit	N/A	N/A	2	500.000.000	N/A	0	N/A	0	2	500.000.000	2	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *****							0		0		0		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilit	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						sedang/berat	asi sedang/berat *****														ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *****							0		0		0		750.000.000		750.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	750.000.000	3	750.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah							0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					/TU *****																S WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat *****	Ruang	N/A	N/A	N/A	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
						Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII ***	%	85,38	78,5	80,41	70.000.000	82,25	80.000.000	83,45	70.000.000	85,11	120.000.000	86,11	120.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMA di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII ****	Angka	N/A	66	66	30.000.000	66	30.000.000	66	30.000.000	66	50.000.000	66	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pend								30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				idikan Sekolah Menengah Kejuruan ****																	- CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Terciptanya iklim inklusivitas SMK di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII ****	Angka	N/A	127	127	30.000.000	127	30.000.000	127	30.000.000	127	50.000.000	127	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencega							30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					han perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****																PENDIDIKAN XII		
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								10.000.000		20.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terciptanya iklim inklusivitas SLB di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII ****	Angka	N/A	6	6	10.000.000	6	20.000.000	6	10.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****							10.000.000		20.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *****	Kegiatan	N/A	N/A	3	10.000.000	3	20.000.000	3	10.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
						Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII ***	%	80	80,1	80,15	82.981.539.000	80,2	86.437.539.000	80,25	86.437.539.000	80,3	90.980.871.000	80,35	100.835.371.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah								37.200.871.000		38.712.871.000		38.712.871.000		41.189.335.000		46.560.786.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Menengah Atas ****																	SWILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMA dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII ****	Angka	N/A	66	66	37.200.871.000	66	38.712.871.000	66	38.712.871.000	66	41.189.335.000	66	46.560.786.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.01.00052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas *****							37.200.871.000		38.712.871.000		38.712.871.000		41.189.335.000		46.560.786.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	66	400.000.000	66	400.000.000	66	400.000.000	66	400.000.000	66	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA *****	Siswa	N/A	N/A	4442	1.972.850.000	4442	3.484.850.000	4442	3.484.850.000	4442	3.484.850.000	4442	3.484.850.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	486	34.828.021.000	486	34.828.021.000	486	34.828.021.000	486	37.304.485.000	486	42.675.936.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Menengah Atas															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								41.213.575.000		43.157.575.000		43.157.575.000		44.912.105.000		48.717.693.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Terwujudnya satuan pendidikan SMK dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII ****	Angka	N/A	127	127	41.213.575.000	127	43.157.575.000	127	43.157.575.000	127	44.912.105.000	127	48.717.693.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pendidikan XII																	
		1.01.02.1.02.00045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan *****							41.213.575.000		43.157.575.000		43.157.575.000		44.912.105.000		48.717.693.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	127	400.000.000	127	400.000.000	127	400.000.000	127	400.000.000	127	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK *****	Siswa	N/A	N/A	567	16.138.500.000	567	18.082.500.000	567	18.082.500.000	567	18.082.500.000	567	18.082.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	373	24.675.075.000	373	24.675.075.000	373	24.675.075.000	373	26.429.605.000	373	30.235.193.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus ****								4.567.093.000		4.567.093.000		4.567.093.000		4.879.431.000		5.556.892.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terwujudnya satuan pendidikan SLB dengan manajemen pengelolaan yang baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII ****	Angka	N/A	6	6	4.567.093.000	6	4.567.093.000	6	4.567.093.000	6	4.879.431.000	6	5.556.892.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus *****							4.567.093.000		4.567.093.000		4.567.093.000		4.879.431.000		5.556.892.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen *****	Satuan Pendidikan	N/A	N/A	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB *****	Siswa	N/A	N/A	149	74.500.000	149	74.500.000	149	74.500.000	149	74.500.000	149	74.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	
						Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP *****	Orang	N/A	N/A	101	4.392.593.000	101	4.392.593.000	101	4.392.593.000	101	4.704.931.000	101	5.382.392.000	SEKSI SEKOLAH MENENG	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						n Sekolah Pendidikan Khusus															AH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM ***									40.000.000		40.000.000		40.000.000		65.000.000		65.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah	%	100	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pendidikan I ***																
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Adaptif	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal	Angka	N/A	186	186	30.000.000	186	30.000.000	186	30.000.000	186	50.000.000	186	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						dan Inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	pilihan Cabdin I ****														RUAN		
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang	Dokumen	4	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersusun *****																
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Adaptif dan Inovatif di Cabang Dinas	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin I ****	Angka	N/A	17	17	10.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000	17	15.000.000	17	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan I															BIASA		
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun *****	Dokumen	2	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR	DEMAK KOTA SALATIGA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIASA		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM ***									40.000.000		40.000.000		40.000.000		31.875.000		31.875.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah	%	100	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	31.875.000	100	31.875.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pendidikan II ***																
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Adaptif	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal	Angka	N/A	233	233	30.000.000	233	30.000.000	233	30.000.000	233	25.000.000	233	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						dan Inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	pilihan Cabdin II ****														RUAN		
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang	Dokumen	2	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersusun *****																
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		6.875.000		6.875.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Adaptif dan Inovatif di Cabang Dinas	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin II ****	Angka	N/A	21	21	10.000.000	21	10.000.000	21	10.000.000	21	6.875.000	21	6.875.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan II															BIAS A		
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		6.875.000		6.875.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun *****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	6.875.000	1	6.875.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR	KENDAL KOTA SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIASA		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM ***									40.000.000		40.000.000		40.000.000		115.000.000		125.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah	%	100	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	115.000.000	100	125.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pendidikan III ***																
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		80.000.000		85.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Adaptif	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal	Angka	N/A	195	195	30.000.000	195	30.000.000	195	30.000.000	195	80.000.000	195	85.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						dan Inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	pilihan Cabdin III ****														RUAN		
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		80.000.000		85.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang	Dokumen	N/A	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	80.000.000	2	85.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersusun *****																
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Adaptif dan Inovatif di Cabang Dinas	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin III ****	Angka	N/A	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	35.000.000	10	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan III															BIAS A		
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun *****	Dokumen	N/A	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR	JEPARA KUDUS PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIASA		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM ***									40.000.000		65.000.000		40.000.000		65.000.000		65.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah	%	100	100	100	40.000.000	100	65.000.000	100	40.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pendidikan IV ***																
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah ****								30.000.000		50.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Adaptif	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal	Angka	N/A	211	211	30.000.000	211	50.000.000	211	30.000.000	211	50.000.000	211	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						dan Inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	pilihan Cabdin 4 ****														RUAN		
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah *****							30.000.000		50.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	50.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersusun *****																
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus ****								10.000.000		15.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Adaptif dan Inovatif di Cabang Dinas	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin 4 ****	Angka	N/A	13	13	10.000.000	13	15.000.000	13	10.000.000	13	15.000.000	13	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan IV															BIASA		
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus *****							10.000.000		15.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun *****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR	BLORA GROBOGAN REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIASA		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM ***									40.000.000		40.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah	%	100	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pendidikan V ***																
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah ****								30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Adaptif	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal	Angka	N/A	144	144	30.000.000	144	30.000.000	144	50.000.000	144	50.000.000	144	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						dan Inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	pilihan Cabdin V ****														RUAN		
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah *****							30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang	Dokumen	N/A	168	168	30.000.000	168	30.000.000	168	50.000.000	168	50.000.000	168	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BOYOLALI KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersusun *****																
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Adaptif dan Inovatif di Cabang Dinas	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin V ****	Angka	N/A	25	25	10.000.000	25	10.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan V															BIASA		
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus *****							10.000.000		10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun *****	Dokumen	N/A	29	29	10.000.000	29	10.000.000	29	25.000.000	29	25.000.000	29	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR	BOYOLALI KLATEN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIASA		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM ***									40.000.000		40.000.000		34.735.000		34.735.000		34.735.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah	%	N/A	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	34.735.000	100	34.735.000	100	34.735.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pendidikan VI ***																
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah ****								30.000.000		30.000.000		26.950.000		26.950.000		26.950.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Adaptif	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal	Angka	N/A	192	192	30.000.000	192	30.000.000	192	26.950.000	192	26.950.000	192	26.950.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						dan Inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	pilihan Cabdin VI ****														RUAN		
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah *****							30.000.000		30.000.000		26.950.000		26.950.000		26.950.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang	Dokumen	1	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	26.950.000	2	26.950.000	2	26.950.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersusun *****																
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		7.785.000		7.785.000		7.785.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Adaptif dan Inovatif di Cabang Dinas	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VI ****	Angka	N/A	29	29	10.000.000	29	10.000.000	29	7.785.000	29	7.785.000	29	7.785.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan VI															BIAS A		
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus *****							10.000.000		10.000.000		7.785.000		7.785.000		7.785.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun *****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	7.785.000	1	7.785.000	1	7.785.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR	KARANGANYAR SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIASA		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM ***									40.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah	%	75	75	75	40.000.000	77	40.000.000	77	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pendidikan VII ***																
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah ****								30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Adaptif	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal	Angka	N/A	141	141	30.000.000	141	30.000.000	141	40.000.000	141	40.000.000	141	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						dan Inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	pilihan Cabdin VII ****														RUAN		
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah *****							30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang	Dokumen	N/A	N/A	4	30.000.000	4	30.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersusun *****																
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Adaptif dan Inovatif di Cabang Dinas	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VII ****	Angka	N/A	24	24	10.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan VII															BIAS A		
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun *****	Dokumen	N/A	N/A	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR	KOTA SURAKARTA SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIASA		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM ***									40.000.000		40.000.000		33.550.000		36.000.000		36.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah	%	89,03	75	75	40.000.000	77	40.000.000	77	33.550.000	80	36.000.000	80	36.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pendidikan VIII ***																
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah ****								30.000.000		30.000.000		25.550.000		26.000.000		26.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Adaptif	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal	Angka	N/A	151	151	30.000.000	151	30.000.000	151	25.550.000	151	26.000.000	151	26.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						dan Inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	pilihan Cabdin VIII ****														RUAN		
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah *****							30.000.000		30.000.000		25.550.000		26.000.000		26.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang	Dokumen	N/A	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	25.550.000	1	26.000.000	1	26.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersusun *****																
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		8.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Adaptif dan Inovatif di Cabang Dinas	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VIII ****	Angka	N/A	8	8	10.000.000	8	10.000.000	8	8.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan VIII															BIAS A		
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus *****								10.000.000		10.000.000		8.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun *****	Dokumen	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR	KOTA MAGELANG MAGELANG TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIASA		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM ***									40.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah	%	100	75	75	40.000.000	77	60.000.000	77	60.000.000	80	60.000.000	80	60.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pendidikan IX ***																
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah ****								30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Adaptif	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal	Angka	N/A	236	236	30.000.000	236	50.000.000	236	50.000.000	236	50.000.000	236	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						dan Inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	pilihan Cabdin IX ****														RUAN		
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah *****							30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang	Dokumen	N/A	N/A	2	30.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersusun *****																
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Adaptif dan Inovatif di Cabang Dinas	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin IX ****	Angka	N/A	15	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan IX															BIAS A		
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun *****	Dokumen	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR	BANJARNEGARA KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIAS A		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM ***									40.000.000		91.000.000		95.000.000		95.000.000		103.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabang Dinas Wilayah	%	N/A	100	100	40.000.000	100	91.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	103.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pendidikan X ***																
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah ****								30.000.000		76.000.000		80.000.000		80.000.000		88.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Adaptif	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal	Angka	N/A	181	181	30.000.000	181	76.000.000	181	80.000.000	181	80.000.000	181	88.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						dan Inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	pilihan Cabdin X ****														RUAN		
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah *****							30.000.000		76.000.000		80.000.000		80.000.000		88.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang	Dokumen	N/A	N/A	1	30.000.000	1	76.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	88.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersusun *****																
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus ****								10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Adaptif dan Inovatif di Cabang Dinas	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin X ****	Angka	N/A	13	13	10.000.000	13	15.000.000	13	15.000.000	13	15.000.000	13	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan X															BIASA		
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus *****							10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun *****	Dokumen	N/A	N/A	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR	BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIASA		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM ***									40.000.000		40.000.000		40.000.000		85.000.000		85.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah	%	100	45	55	40.000.000	60	40.000.000	64,38	40.000.000	70,63	85.000.000	75	85.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pendidikan XI ***																
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Adaptif	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal	Angka	N/A	247	247	30.000.000	247	30.000.000	247	30.000.000	247	75.000.000	247	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						dan Inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	pilihan Cabdin XI ****														RUAN		
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang	Dokumen	N/A	N/A	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersusun *****																
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Adaptif dan Inovatif di Cabang Dinas	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XI ****	Angka	4	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan XI															BIAS A		
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun *****	Dokumen	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR	BREBES KOTA TEGAL TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIASA		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM ***									40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah	%	100	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pendidikan XII ***																
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Adaptif	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal	Angka	N/A	193	193	30.000.000	193	30.000.000	193	30.000.000	193	30.000.000	193	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						dan Inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	pilihan Cabdin XII ****														RUAN		
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang	Dokumen	N/A	N/A	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Tersusun *****																
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus ****								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Adaptif dan Inovatif di Cabang Dinas	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XII ****	Angka	N/A	6	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Wilayah Pendidikan XII															BIAS A		
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun *****	Dokumen	N/A	N/A	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR	BATANG KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					BIASA		
	Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan **											78.900.000.000		78.900.000.000		78.900.000.000		78.900.000.000		78.900.000.000	Dinas Pendidikan		
							Tingkat Penyerapan Lulusan SMK **	%	89,88	90,38	90,88	78.900.000.000	91,38	78.900.000.000	91,88	78.900.000.000	92,38	78.900.000.000	92,88	78.900.000.000	Dinas Pendidikan		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PEN									76.400.000.000		76.400.000.000		76.400.000.000		76.400.000.000		76.400.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pemb		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			DIDIKAN ***																		inaan SMK		
						Meningkatnya relevansi pendidikan menengah kejuruan	Nilai Kualitas Pembelajaran selaras dunia kerja ***	Angka	63,85	67,65	67,77	76.400.000.000	67,89	76.400.000.000	68,01	76.400.000.000	68,13	76.400.000.000	68,25	76.400.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								76.400.000.000		76.400.000.000		76.400.000.000		76.400.000.000		76.400.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Terlaksananya proses pembelajaran kejuruan selaras DUDI di Bidang	Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI ****	Siswa	188835	189307	198837	5.200.000.000	190369	5.200.000.000	190902	5.200.000.000	191474	5.200.000.000	192049	5.200.000.000	Bidang Pembinaan SMK		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Pembinaan SMK																	
		1.01.02.1.02.00060			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik *****							5.200.000.000		5.200.000.000		5.200.000.000		5.200.000.000		5.200.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi *****	Orang	N/A	10000	10000	5.200.000.000	10000	5.200.000.000	10000	5.200.000.000	10000	5.200.000.000	10000	5.200.000.000	Bidang Pembinaan SMK	Bidang Pembinaan SMK, JAWA TENGAH	
						Terlaksananya proses pembelajaran kejuruan selaras DUDI di Bidang Pembinaan SMK	Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian ****	Unit	204254	214467	225190	71.200.000.000	236450	71.200.000.000	248273	71.200.000.000	260687	71.200.000.000	273721	71.200.000.000	Bidang Pembinaan SMK		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik *****							71.200.000.000		71.200.000.000		71.200.000.000		71.200.000.000		71.200.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK		
						Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia *****	Paket	N/A	60	60	71.200.000.000	60	71.200.000.000	60	71.200.000.000	60	71.200.000.000	60	71.200.000.000	Bidang Pembinaan SMK	Bidang Pembinaan SMK, JAWA TENGAH	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ***									2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kompetensi guru berlisensi	Persentase Guru SMK yang Memiliki Sertifikat keahlian ***	%	1,1	1,42	1,74	2.500.000.000	2,06	2.500.000.000	2,38	2.500.000.000	2,7	2.500.000.000	3,03	2.500.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ****								2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya pendidik SMK memiliki keahlian selaras DUDI di Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat keahlian ****	Orang	515	665	815	2.500.000.000	965	2.500.000.000	1115	2.500.000.000	1265	2.500.000.000	1415	2.500.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
		1.01.02.1.02.0056			Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK *****							2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
						Pendidik SMK yang mendapat sertifikat	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat	Orang	N/A	N/A	150	2.500.000.000	150	2.500.000.000	150	2.500.000.000	150	2.500.000.000	150	2.500.000.000	Dinas Pendidikan -	Bidang Pembinaan Ketenagaan Dikbud, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						kompetensi	kompetensi *****														Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pendidi												5.314.349.596.000		5.373.823.429.000		5.499.595.265.000		5.765.624.316.000		5.950.542.553.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
kan *																							
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan *	Angka	55,95	65,01	70,12		72,11		74,01		76,51		80,1		Dinas Pendidikan		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas											21.500.000.000		21.300.000.000		21.500.000.000		22.500.000.000		22.500.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	Pendidikan **																						
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pendidikan **	Angka	3,013	3,1	3,15	21.500.000.000	3,3	21.300.000.000	3,35	21.500.000.000	3,4	22.500.000.000	3,45	22.500.000.000	Dinas Pendidikan		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									21.500.000.000		21.300.000.000		21.500.000.000		22.500.000.000		22.500.000.000	Dinas Pendidikan		
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas	%	100	100	100	21.500.000.000	100	21.300.000.000	100	21.500.000.000	100	22.500.000.000	100	22.500.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						daerah di Dinas Pendidikan	Pendidikan ***																
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								21.500.000.000		21.300.000.000		21.500.000.000		22.500.000.000		22.500.000.000	Dinas Pendidikan		
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	100	21.500.000.000	100	21.300.000.000	100	21.500.000.000	100	22.500.000.000	100	22.500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.01.00001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							19.800.000.000		19.800.000.000		19.800.000.000		20.800.000.000		20.800.000.000	Dinas Pendidikan		
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	6	6	6	19.800.000.000	6	19.800.000.000	6	19.800.000.000	6	20.800.000.000	6	20.800.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.01.00007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	Dinas Pendidikan		
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	6	6	6	700.000.000	6	700.000.000	6	700.000.000	6	700.000.000	6	700.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.01.00008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik							500.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Sektoral Daerah *****																		
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	1	500.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							500.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	500.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan **											5.292.849.596.000		5.352.523.429.000		5.478.095.265.000		5.743.124.316.000		5.928.042.553.000	Dinas Pendidikan		
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat	Angka	3,37	3,31	3,35	5.292.849.596.000	3,39	5.352.523.429.000	3,4	5.478.095.265.000	3,45	5.743.124.316.000	3,5	5.928.042.553.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Daerah Dinas Pendidikan **																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									5.265.255.756.000		5.329.935.789.000		5.455.981.865.000		5.718.649.818.000		5.903.402.069.000	Dinas Pendidikan		
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan ***	%	100	100	100	5.265.255.756.000	100	5.329.935.789.000	100	5.455.981.865.000	100	5.718.649.818.000	100	5.903.402.069.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								5.221.504.432.000		5.285.823.289.000		5.412.630.915.000		5.673.863.997.000		5.856.044.612.000	Dinas Pendidikan		
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	12	5.221.504.432.000	12	5.285.823.289.000	12	5.412.630.915.000	12	5.673.863.997.000	12	5.856.044.612.000	SUB BAGIAN KEUANGAN		
		X.XX.01.1.02.00001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							5.219.055.814.000		5.283.374.671.000		5.410.182.297.000		5.670.604.886.000		5.852.459.590.000	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	3284	3284	3284	5.219.055.814.000	3284	5.283.374.671.000	3284	5.410.182.297.000	3284	5.670.604.886.000	3284	5.852.459.590.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							2.448.618.000		2.448.618.000		2.448.618.000		3.259.111.000		3.585.022.000	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	12	12	12	2.448.618.000	12	2.448.618.000	12	2.448.618.000	12	3.259.111.000	12	3.585.022.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								583.000.000		583.000.000		583.000.000		641.300.000		705.430.000	Dinas Pendidikan		
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	4	583.000.000	4	583.000.000	4	583.000.000	4	641.300.000	4	705.430.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
		X.XX.01.1.03.00001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah							55.000.000		55.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					SKPD *****																		
						Tersediannya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	2	2	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000	2	66.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							308.000.000		308.000.000		308.000.000		338.800.000		372.680.000	Dinas Pendidikan		
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	4	308.000.000	4	308.000.000	4	308.000.000	4	338.800.000	4	372.680.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****							165.000.000		165.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanaanya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	3	5	5	165.000.000	6	165.000.000	6	165.000.000	6	181.500.000	6	199.650.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****							55.000.000		55.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	Dinas Pendidikan		
						Terlaksanaanya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	2	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000	2	66.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daer								522.500.000		522.500.000		522.500.000		574.750.000		632.225.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				ah ****																			
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	522.500.000	100	522.500.000	100	522.500.000	100	574.750.000	100	632.225.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
		X.XX.01.1.05.00002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	35,844	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.05.00003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							275.000.000		275.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000	Dinas Pendidikan		
						Terlaksanya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	3	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	4	302.500.000	4	332.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.05.00005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****							55.000.000		55.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	Dinas Pendidikan		
						Terlaksanya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Dokumen	2	2	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000	2	66.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Pegawai *****																
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan		
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****							27.500.000		27.500.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	2	3	80	27.500.000	88	27.500.000	96	27.500.000	104	30.250.000	112	33.275.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****							165.000.000		165.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000	Dinas Pendidikan		
						Terlaksanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	3	3	440	165.000.000	460	165.000.000	480	165.000.000	500	181.500.000	520	199.650.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06		Administrasi								3.654		3.654		3.062		3.368		4.143	Dinas		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Umum Perangkat Daerah ****								.000.000		.000.000		.200.000		.420.000		.070.000	Pendidikan		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	3.654.000.000	100	3.654.000.000	100	3.062.200.000	100	3.368.420.000	100	4.143.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor *****							176.000.000		176.000.000		176.000.000		193.600.000		212.960.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	176.000.000	1	176.000.000	1	176.000.000	1	193.600.000	1	212.960.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.00002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							220.000.000		220.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	2	220.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	2	266.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.00003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							308.000.000		308.000.000		308.000.000		338.800.000		372.680.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	2	2	2	308.000.000	2	308.000.000	2	308.000.000	2	338.800.000	2	372.680.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							275.000.000		275.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	275.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							88.000.000		88.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediaan ya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	2	2	2	88.000.000	2	88.000.000	2	88.000.000	2	96.800.000	2	106.480.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan		
						Tersediaya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan							825.000.000		825.000.000		650.000.000		715.000.000		750.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Tamu *****																		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	825.000.000	12	825.000.000	12	650.000.000	12	715.000.000	12	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							1.430.000.000		1.430.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.660.000.000	Dinas Pendidikan		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	1.430.000.000	12	1.430.000.000	12	1.000.000.000	12	1.100.000.000	12	1.660.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada							132.000.000		132.000.000		145.200.000		159.720.000		200.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					SKPD *****																		
						Terlaksanaanya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	2	2	2	132.000.000	2	132.000.000	2	145.200.000	2	159.720.000	2	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		220.000.000		242.000.000	Dinas Pendidikan		
						Terlaksanaanya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Dokumen	2	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							SKPD *****																
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								1.775.000.000		1.502.500.000		1.332.750.000		1.466.025.000		1.612.627.000	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Unit	50	60	24	1.775.000.000	100	1.502.500.000	65	1.332.750.000	65	1.466.025.000	65	1.612.627.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						nilai aset di Dinas Pendidikan	disediakan ****																
		X.XX.01.1.07.00005			Pengadaan Mebel *****							275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000		402.627.000	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	2	2	2	275.000.000	2	302.500.000	2	332.750.000	2	366.025.000	2	402.627.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.07.00006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	10	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPE	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					GAWAIAN		
		X.XX.01.1.07.00007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.07.00008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.			Pengadaan Gedung							0		0		0		0		0	Dinas		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		07.0009			Kantor atau Bangunan Lainnya *****																Pendidikan		
						Tersediannya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							500.000.000		700.000.000		500.000.000		550.000.000		605.000.000	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	5	5	6	500.000.000	6	700.000.000	7	500.000.000	7	550.000.000	8	605.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPE	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan *****														GAWAIAN		
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		550.000.000		605.000.000	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	50	40	17	1.000.000.000	18	500.000.000	20	500.000.000	22	550.000.000	24	605.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								35.270.824.000		35.942.000.000		35.942.000.000		36.635.976.000		37.954.820.000	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	35.270.824.000	4	35.942.000.000	4	35.942.000.000	4	36.635.976.000	4	37.954.820.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							22.000.000		22.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanany a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	24.200.000	12	26.620.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							2.016.461.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000	Dinas Pendidikan		
						Tersediany a Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	2.016.461.000	12	2.200.000.000	12	2.200.000.000	12	2.420.000.000	12	2.662.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan							220.000.000		220.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Perlengkapan Kantor *****																		
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	242.000.000	12	266.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.08.00004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							33.012.363.000		33.500.000.000		33.500.000.000		33.949.776.000		35.000.000.000	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	33.012.363.000	12	33.500.000.000	12	33.500.000.000	12	33.949.776.000	12	35.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.946.000.000		1.908.500.000		1.908.500.000		2.099.350.000		2.309.285.000	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Pendidikan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	100	100	120	1.946.000.000	120	1.908.500.000	120	1.908.500.000	120	2.099.350.000	120	2.309.285.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.09.00001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							264.000.000		264.000.000		264.000.000		290.400.000		319.440.000	Dinas Pendidikan		
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	17	17	17	264.000.000	17	264.000.000	17	264.000.000	17	290.400.000	17	319.440.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							55.000.000		55.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	Dinas Pendidikan		
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	200	200	200	55.000.000	200	55.000.000	200	55.000.000	200	60.500.000	200	66.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							82.500.000		82.500.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000	Dinas Pendidikan		
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	12	12	12	82.500.000	12	82.500.000	12	82.500.000	12	90.750.000	12	99.825.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							11.000.000		11.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanaya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							66.000.000		66.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000	Dinas Pendidikan		
						Terlaksanaya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	3	3	3	66.000.000	3	66.000.000	3	66.000.000	3	72.600.000	3	79.860.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	15	15	6	1.000.000.000	7	1.000.000.000	8	1.000.000.000	8	1.100.000.000	9	1.210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							330.000.000		330.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000	Dinas Pendidikan		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	210	220	220	330.000.000	220	330.000.000	220	330.000.000	220	363.000.000	220	399.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Bangunan Lainnya	/Direhabilitasi *****																
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							137.500.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000		121.000.000	Dinas Pendidikan		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	250	250	250	137.500.000	250	100.000.000	250	100.000.000	250	110.000.000	250	121.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi Sekretariat, JAWA TENGAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi *****																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									2.884.500.000		2.631.050.000		2.594.285.000		3.144.005.000		3.428.901.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran ***	%	100	100	100	2.884.500.000	100	2.631.050.000	100	2.594.285.000	100	3.144.005.000	100	3.428.901.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								12.000.000		6.600.000		7.260.000		7.986.000		8.784.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajar		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					an Kelas A		
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	2	1	1	12.000.000	1	6.600.000	1	7.260.000	1	7.986.000	1	8.784.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							12.000.000		6.600.000		7.260.000		7.986.000		8.784.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	2	N/A	1	12.000.000	1	6.600.000	1	7.260.000	1	7.986.000	1	8.784.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								1.128.000.000		876.000.000		954.450.000		1.020.395.000		1.092.933.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	68	68	68	1.128.000.000	68	876.000.000	68	954.450.000	68	1.020.395.000	68	1.092.933.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor *****							24.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					Kelas A		
						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	12	24.000.000	12	66.000.000	12	72.600.000	12	79.860.000	12	87.846.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							135.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	12	135.000.000	12	165.000.000	12	181.500.000	12	199.650.000	12	219.615.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Disediakan *****																
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							36.000.000		49.500.000		54.450.000		59.895.000		65.884.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	12	36.000.000	12	49.500.000	12	54.450.000	12	59.895.000	12	65.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan							20.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.000	Dinas Pendidikan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					dan Penggandaan *****																- Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	8	8	8	20.000.000	8	27.500.000	8	30.250.000	8	33.275.000	8	36.602.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					dikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.00008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							78.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajar		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					an Kelas A		
						Terlaksanany a Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	78.000.000	12	88.000.000	12	96.800.000	12	106.480.000	12	117.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							185.000.000		185.000.000		223.850.000		246.235.000		270.858.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Terlaksanany a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	12	12	12	185.000.000	12	185.000.000	12	223.850.000	12	246.235.000	12	270.858.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD *****															TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							650.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	2	650.000.000	2	295.000.000	2	295.000.000	2	295.000.000	2	295.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								390.000.000		41.250.000		45.375.000		49.912.000		54.903.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	4	15	5	390.000.000	5	41.250.000	5	45.375.000	5	49.912.000	5	54.903.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Mutu Pembelajaran Kelas A																	
		X.XX.01.1.07.00005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.00006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							34.000.000		41.250.000		45.375.000		49.912.000		54.903.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	4	13	5	34.000.000	5	41.250.000	5	45.375.000	5	49.912.000	5	54.903.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							356.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Tekn		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					ologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Tersediaya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	356.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediaya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Tersediaya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****																
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Penduk ung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							Lainnya yang Disediakan *****																
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								883.000.000		1.082.400.000		1.027.400.000		1.309.704.000		1.440.674.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	15	15	883.000.000	15	1.082.400.000	15	1.027.400.000	15	1.309.704.000	15	1.440.674.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.00001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.000.000		4.400.000		4.400.000		5.324.000		5.856.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	3	3	3.000.000	3	4.400.000	3	4.400.000	3	5.324.000	3	5.856.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							330.000.000		418.000.000		418.000.000		505.780.000		556.358.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	330.000.000	4	418.000.000	4	418.000.000	4	505.780.000	4	556.358.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		55.000.000		55.000.000		66.550.000		73.205.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	4	0	4	55.000.000	4	55.000.000	4	66.550.000	4	73.205.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08.00004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							550.000.000		605.000.000		550.000.000		732.050.000		805.255.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	550.000.000	4	605.000.000	4	550.000.000	4	732.050.000	4	805.255.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								471.500.000		624.800.000		559.800.000		756.008.000		831.607.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	223	290	290	471.500.000	290	624.800.000	290	559.800.000	290	756.008.000	290	831.607.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas							60.000.000		52.800.000		52.800.000		63.888.000		70.276.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Operasional atau Lapangan *****																Pembelajaran Kelas A		
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	12	12	12	60.000.000	12	52.800.000	12	52.800.000	12	63.888.000	12	70.276.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							35.000.000		38.500.000		38.500.000		46.585.000		51.243.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	60	60	35.000.000	60	38.500.000	60	38.500.000	60	46.585.000	60	51.243.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin							132.500.000		165.000.000		165.000.000		199.650.000		219.615.000	Dinas Pendidikan - Balai		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Lainnya *****																Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	12	210	210	132.500.000	210	165.000.000	210	165.000.000	210	199.650.000	210	219.615.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							30.000.000		93.500.000		93.500.000		113.135.000		124.448.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	12	3	3	30.000.000	3	93.500.000	3	93.500.000	3	113.135.000	3	124.448.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajar	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					an Kelas A		
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	3	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendi	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					dikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
		X.XX.01.1.09.00009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							204.000.000		209.000.000		200.000.000		252.890.000		278.179.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2	2	204.000.000	2	209.000.000	2	200.000.000	2	252.890.000	2	278.179.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Bangunan Lainnya	/Direhabilitasi *****														Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							10.000.000		66.000.000		10.000.000		79.860.000		87.846.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	3	3	2	10.000.000	2	66.000.000	2	10.000.000	2	79.860.000	2	87.846.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.619.000.000		1.451.000.000		1.451.000.000		1.591.000.000		1.371.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I ***	%	100	100	100	1.619.000.000	100	1.451.000.000	100	1.451.000.000	100	1.591.000.000	100	1.371.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								30.000.000		35.000.000		35.000.000		45.000.000		45.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							30.000.000		35.000.000		35.000.000		45.000.000		45.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Terlaksanaya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								504.000.000		524.000.000		524.000.000		571.000.000		591.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	504.000.000	100	524.000.000	100	524.000.000	100	571.000.000	100	591.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.00001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangun							20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					an Kantor *****																YAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	3	3	20.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							140.000.000		140.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	N/A	4	4	140.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	4	150.000.000	4	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							yang Disediakan *****																
		X.XX.01.1.06.00003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	4	20.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.00004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							40.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					YAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	4	40.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							90.000.000		90.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					PENDIDIKAN I		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								365.000.000		170.000.000		170.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	10	10	12	365.000.000	12	170.000.000	14	170.000.000	14	190.000.000	15	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

JAWA-TENGAH
PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	4	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							135.000.000		140.000.000		140.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	4	4	135.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							200.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	200.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					atau Bangunan Lainnya *****																YAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								410.000.000		410.000.000		410.000.000		430.000.000		190.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	12	410.000.000	12	410.000.000	12	410.000.000	12	430.000.000	12	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.00001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Terlaksananya Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	N/A	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Surat Menyurat	Menyurat *****														USAHA		
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							130.000.000		130.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	4	130.000.000	4	130.000.000	4	130.000.000	4	140.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleng							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					kapan Kantor *****																NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.08.00004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							270.000.000		270.000.000		270.000.000		280.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	1	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	280.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								310.000.000		312.000.000		312.000.000		355.000.000		355.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	20	20	22	310.000.000	22	312.000.000	24	312.000.000	25	355.000.000	25	355.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							10.000.000		12.000.000		12.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	10	10	10.000.000	12	12.000.000	14	12.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.			Pemeliharaan Peralata							20.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		09.00 06			n dan Mesin Lainnya *****																dikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	5	5	20.000.000	10	20.000.000	15	20.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX. 01.1. 09.00 07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit	N/A	5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	SUB BAGIAN TATA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tetap Lainnya	Dipelihara *****														USAHA		
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN I		
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK KOTA SALATIGA OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.531.890.000		1.546.890.000		1.381.890.000		1.381.890.000		1.381.890.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II ***	%	100	100	100	1.531.890.000	100	1.546.890.000	100	1.381.890.000	100	1.381.890.000	100	1.381.890.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Terlaksanany a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								480.000.000		480.000.000		480.000.000		480.000.000		480.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	95	96	97	480.000.000	97	480.000.000	100	480.000.000	100	480.000.000	100	480.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.00001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangun							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					an Kantor *****																YAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							yang Disediakan *****																
		X.XX.01.1.06.00003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.00004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					YAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					PENDIDIKAN II		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								250.000.000		265.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	20	21	22	250.000.000	23	265.000.000	24	100.000.000	25	100.000.000	20	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

JAWA-TENGAH
PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							150.000.000		165.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	29	44	10	150.000.000	15	165.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					atau Bangunan Lainnya *****																YAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								533.000.000		533.000.000		533.000.000		533.000.000		533.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1	2	2	533.000.000	3	533.000.000	3	533.000.000	3	533.000.000	4	533.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.00001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Terlaksananya Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	12	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Surat Menyurat	Menyurat *****														USAHA		
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleng							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					kapan Kantor *****																NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08.00004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							324.000.000		324.000.000		324.000.000		324.000.000		324.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	324.000.000	12	324.000.000	12	324.000.000	12	324.000.000	12	324.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								268.890.000		268.890.000		268.890.000		268.890.000		268.890.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	15	35	36	268.890.000	37	268.890.000	38	268.890.000	39	268.890.000	40	268.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								24.290.000		24.290.000		24.290.000		24.290.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	2	2	2	24.290.000	2	24.290.000	2	24.290.000	2	24.290.000	2	24.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	9	9	18.000.000	9	18.000.000	9	18.000.000	9	18.000.000	9	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.			Pemeliharaan Peralata							26.600.000		26.600.000		26.600.000		26.600.000		26.600.000	Dinas Pendi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		09.0006			n dan Mesin Lainnya *****																dikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	30	30	30	26.600.000	30	26.600.000	30	26.600.000	30	26.600.000	30	26.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tetap Lainnya	Dipelihara *****														USAHA		
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN II		
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									2.471.000.000		2.261.000.000		2.261.000.000		3.146.000.000		3.331.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III ***	%	100	100	100	2.471.000.000	100	2.261.000.000	100	2.261.000.000	100	3.146.000.000	100	3.331.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								60.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	60.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							60.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Terlaksanaanya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	1	60.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								580.000.000		625.000.000		625.000.000		755.000.000		805.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	580.000.000	100	625.000.000	100	625.000.000	100	755.000.000	100	805.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.00001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangun							30.000.000		40.000.000		40.000.000		60.000.000		70.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					an Kantor *****																YAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	4	30.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							80.000.000		90.000.000		90.000.000		110.000.000		120.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	N/A	N/A	4	80.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	110.000.000	4	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							yang Disediakan *****																
		X.XX.01.1.06.00003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							40.000.000		50.000.000		50.000.000		70.000.000		80.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	4	40.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.06.00004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					YAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							40.000.000		45.000.000		45.000.000		55.000.000		55.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	4	40.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							80.000.000		90.000.000		90.000.000		110.000.000		120.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					PENDIDIKAN III		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	12	12	80.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							250.000.000		250.000.000		250.000.000		290.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	290.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								550.000.000		200.000.000		200.000.000		420.000.000		450.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	22	37	40	550.000.000	45	200.000.000	50	200.000.000	55	420.000.000	60	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							300.000.000		150.000.000		150.000.000		370.000.000		400.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	9	10	300.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	370.000.000	10	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							200.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	200.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					atau Bangunan Lainnya *****																YAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								721.000.000		761.000.000		761.000.000		846.000.000		881.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	12	721.000.000	12	761.000.000	12	761.000.000	12	846.000.000	12	881.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.00001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Terlaksanya Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	N/A	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Surat Menyurat	Menyurat *****														USAHA		
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							300.000.000		315.000.000		315.000.000		350.000.000		360.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	12	300.000.000	12	315.000.000	12	315.000.000	12	350.000.000	12	360.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleng							15.000.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					kapan Kantor *****																NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	12	15.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.08.00004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							400.000.000		420.000.000		420.000.000		460.000.000		480.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	12	400.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	460.000.000	12	480.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								560.000.000		610.000.000		610.000.000		1.050.000.000		1.115.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	68	56	60	560.000.000	63	610.000.000	67	610.000.000	70	1.050.000.000	73	1.115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						70.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000		110.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	8	8	70.000.000	8	80.000.000	8	80.000.000	8	100.000.000	8	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	3	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.			Pemeliharaan Peralata							50.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000		75.000.000	Dinas Pendi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		09.00 06			n dan Mesin Lainnya *****																dikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	50	60	50.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	70.000.000	60	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX. 01.1. 09.00 07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit	N/A	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tetap Lainnya	Dipelihara *****														USAHA		
		X.XX.01.1.09.00008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.09.00009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		650.000.000		670.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN III		
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	650.000.000	3	670.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							30.000.000		45.000.000		45.000.000		75.000.000		90.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	3	3	30.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	75.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							30.000.000		45.000.000		45.000.000		75.000.000		90.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	3	3	30.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	75.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA KUDUS OPD Provinsi PATI	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.272.000.000		1.782.000.000		1.282.000.000		1.292.000.000		1.302.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV ***	%	100	100	100	1.272.000.000	100	1.782.000.000	100	1.282.000.000	100	1.292.000.000	100	1.302.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Terlaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								426.000.000		426.000.000		426.000.000		426.000.000		426.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	426.000.000	100	426.000.000	100	426.000.000	100	426.000.000	100	426.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.00001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangun							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					an Kantor *****																YAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							yang Disediakan *****																
		X.XX.01.1.06.00003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.06.00004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					YAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					PENDIDIKAN IV		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								50.000.000		550.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	1	8	50.000.000	3	550.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		300.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	N/A	0	1	300.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	6	5	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							0		200.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					atau Bangunan Lainnya *****																YAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	200.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								456.000.000		466.000.000		466.000.000		476.000.000		486.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	4	4	456.000.000	4	466.000.000	4	466.000.000	4	476.000.000	4	486.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.00001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Terlaksananya Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	1	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Surat Menyurat	Menyurat *****														USAHA		
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleng							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					kapan Kantor *****																NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.08.00004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							200.000.000		210.000.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	200.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								315.000.000		315.000.000		315.000.000		315.000.000		315.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	51	56	315.000.000	59	315.000.000	62	315.000.000	65	315.000.000	68	315.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	2	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	25	25	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.			Pemeliharaan Peralata							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		09.00 06			n dan Mesin Lainnya *****																dikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	58	58	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX. 01.1. 09.00 07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tetap Lainnya	Dipelihara *****														USAHA		
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN IV		
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA GROBOGAN OPD Provinsi REMBANG	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									2.142.000.000		1.145.000.000		1.152.000.000		1.152.000.000		1.152.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V ***	%	100	100	100	2.142.000.000	100	1.145.000.000	100	1.152.000.000	100	1.152.000.000	100	1.152.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Terlaksanaanya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								395.500.000		395.500.000		395.500.000		395.500.000		395.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	395.500.000	100	395.500.000	100	395.500.000	100	395.500.000	100	395.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.00001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangun							10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAY		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					an Kantor *****																AH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	N/A	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							yang Disediakan *****																
		X.XX.01.1.06.00003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.00004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAY		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					AH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					PENDIDIKAN V		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	1	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								1.072.000.000		75.000.000		82.000.000		82.000.000		82.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	13	3	3	1.072.000.000	3	75.000.000	3	82.000.000	3	82.000.000	3	82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							12.000.000		15.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	1	12.000.000	1	15.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					SWIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							1.000.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	1	1.000.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAY		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					atau Bangunan Lainnya *****																AH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								493.500.000		493.500.000		493.500.000		493.500.000		493.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	5	5	5	493.500.000	5	493.500.000	5	493.500.000	5	493.500.000	5	493.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.00001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Terlaksananya Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	N/A	1	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Surat Menyurat	Menyurat *****														USAHA		
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleng							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					kapan Kantor *****																NG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08.00004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	2	2	290.000.000	2	290.000.000	2	290.000.000	2	290.000.000	2	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								174.000.000		174.000.000		174.000.000		174.000.000		174.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	2	46	48	174.000.000	48	174.000.000	48	174.000.000	48	174.000.000	48	174.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	20	20	4.000.000	20	4.000.000	20	4.000.000	20	4.000.000	20	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.			Pemeliharaan Peralata							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		09.00 06			n dan Mesin Lainnya *****																dikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	24	24	20.000.000	24	20.000.000	24	20.000.000	24	20.000.000	24	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX. 01.1. 09.00 07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tetap Lainnya	Dipelihara *****														USAHA		
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN V		
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	1	66.000.000	1	66.000.000	1	66.000.000	1	66.000.000	1	66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BOYOLALI KLATEN OPD Provinsi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.472.400.000		1.642.400.000		1.042.400.000		1.217.400.000		1.042.400.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI ***	%	100	100	100	1.472.400.000	100	1.642.400.000	100	1.042.400.000	100	1.217.400.000	100	1.042.400.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								356.000.000		356.000.000		356.000.000		356.000.000		356.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	356.000.000	100	356.000.000	100	356.000.000	100	356.000.000	100	356.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.00001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangun							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					an Kantor *****																YAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	2	3	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							yang Disediakan *****																
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					YAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					PENDIDIKAN VI		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								430.000.000		600.000.000		0		175.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai asset di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	6	17	13	430.000.000	1	600.000.000	N/A	0	9	175.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							35.000.000		0		0		35.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	35.000.000	N/A	0	N/A	0	1	35.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							165.000.000		0		0		140.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	5	16	11	165.000.000	N/A	0	N/A	0	1	140.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							230.000.000		600.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	230.000.000	1	600.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					atau Bangunan Lainnya *****																YAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								520.400.000		520.400.000		520.400.000		520.400.000		520.400.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	12	12	520.400.000	12	520.400.000	12	520.400.000	12	520.400.000	12	520.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.00001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terlaksanannya Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	12	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Surat Menyurat	Menyurat *****														USAHA		
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleng							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					kapan Kantor *****																NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.08.00004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							335.400.000		335.400.000		335.400.000		335.400.000		335.400.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	335.400.000	12	335.400.000	12	335.400.000	12	335.400.000	12	335.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								166.000.000		166.000.000		166.000.000		166.000.000		166.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	28	47	47	166.000.000	47	166.000.000	47	166.000.000	47	166.000.000	47	166.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	12	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.			Pemeliharaan Peralata							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		09.00 06			n dan Mesin Lainnya *****																dikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	15	33	33	40.000.000	33	40.000.000	33	40.000.000	33	40.000.000	33	40.000.000	SUBBAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX. 01.1. 09.00 07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUBBAGIAN TATA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tetap Lainnya	Dipelihara *****														USAHA		
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN VI		
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KARANGANYAR OPD Provinsi SRAGEN WONOGIRI	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									2.097.000.000		2.063.500.000		2.207.000.000		2.373.500.000		2.537.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII ***	%	100	100	100	2.097.000.000	100	2.063.500.000	100	2.207.000.000	100	2.373.500.000	100	2.537.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								65.000.000		68.000.000		72.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	65.000.000	1	68.000.000	1	72.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							65.000.000		68.000.000		72.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Terlaksanaanya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	1	65.000.000	1	68.000.000	1	72.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																						Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								506.000.000		536.000.000		562.000.000		607.000.000		647.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	506.000.000	100	536.000.000	100	562.000.000	100	607.000.000	100	647.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor *****							35.000.000		38.500.000		42.000.000		47.000.000		51.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	12	35.000.000	12	38.500.000	12	42.000.000	12	47.000.000	12	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							79.000.000		86.000.000		90.000.000		106.000.000		116.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN VII		
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	12	79.000.000	12	86.000.000	12	90.000.000	12	106.000.000	12	116.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							42.000.000		46.000.000		50.000.000		57.000.000		62.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	12	42.000.000	12	46.000.000	12	50.000.000	12	57.000.000	12	62.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							15.000.000		16.500.000		18.000.000		20.000.000		22.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							24.000.000		26.000.000		28.000.000		32.000.000		35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	12	24.000.000	12	26.000.000	12	28.000.000	12	32.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	12	12.000.000	12	13.000.000	12	14.000.000	12	15.000.000	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.00008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							99.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		145.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	12	99.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000	12	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.06.00009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanany a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								250.000.000		75.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	35	110	10	250.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																						Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.07.00006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							250.000.000		75.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	5	250.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.07.00007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersediannya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN VII		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Penduk ung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								726.000.000		796.000.000		866.000.000		936.000.000		1.006.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	12	726.000.000	12	796.000.000	12	866.000.000	12	936.000.000	12	1.006.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.00001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Terlaksananya Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	N/A	N/A	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Surat Menyurat	Menyurat *****														USAHA	SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							400.000.000		440.000.000		480.000.000		520.000.000		560.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	400.000.000	12	440.000.000	12	480.000.000	12	520.000.000	12	560.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan -		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Perlengkapan Kantor *****																CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.08.00004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							320.000.000		350.000.000		380.000.000		410.000.000		440.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	320.000.000	12	350.000.000	12	380.000.000	12	410.000.000	12	440.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								550.000.000		588.500.000		627.000.000		665.500.000		704.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	229	264	374	550.000.000	384	588.500.000	389	627.000.000	394	665.500.000	399	704.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	5	30.000.000	5	35.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	5	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							70.000.000		73.500.000		77.000.000		80.500.000		84.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	374	70.000.000	384	73.500.000	389	77.000.000	394	80.500.000	399	84.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung							250.000.000		270.000.000		290.000.000		310.000.000		330.000.000	Dinas Pendidikan -		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Kantor dan Bangunan Lainnya *****																CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	1	250.000.000	1	270.000.000	1	290.000.000	1	310.000.000	1	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							200.000.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000		240.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000	1	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII, JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA OPD Provinsi SUKOHARJO	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									2.001.250.000		1.801.250.000		2.262.250.000		2.450.500.000		2.454.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII ***	%	100	100	100	2.001.250.000	100	1.801.250.000	100	2.262.250.000	100	2.450.500.000	100	2.454.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Terlaksanaanya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																						Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								418.500.000		418.500.000		418.500.000		452.500.000		452.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	N/A	N/A	418.500.000	N/A	418.500.000	N/A	418.500.000	N/A	452.500.000	N/A	452.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor *****							16.500.000		16.500.000		16.500.000		17.500.000		17.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	16.500.000	1	16.500.000	1	16.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN VIII		
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							12.000.000		12.000.000		12.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanaanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai asset di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	10	10	12	375.000.000	15	375.000.000	18	375.000.000	20	375.000.000	20	375.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																						Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.07.00006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.07.00007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersediannya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN VIII		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								466.750.000		466.750.000		468.750.000		469.000.000		469.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	4	466.750.000	4	466.750.000	4	468.750.000	4	469.000.000	4	469.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.00001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.750.000		1.750.000		1.750.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Terlaksananya Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	N/A	N/A	4	1.750.000	4	1.750.000	4	1.750.000	4	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Surat Menyurat	Menyurat *****														USAHA	MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan							7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Dinas Pendidikan -		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Perlengkapan Kantor *****																CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							308.000.000		308.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	4	308.000.000	4	308.000.000	4	310.000.000	4	310.000.000	4	310.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								711.000.000		511.000.000		965.000.000		1.119.000.000		1.123.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	10	10	12	711.000.000	15	511.000.000	18	965.000.000	20	1.119.000.000	20	1.123.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								25.000.000		25.000.000		27.000.000		27.000.000		29.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	5	25.000.000	5	25.000.000	5	27.000.000	5	27.000.000	5	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							50.000.000		50.000.000		52.000.000		52.000.000		54.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	10	50.000.000	10	50.000.000	10	52.000.000	10	52.000.000	10	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							36.000.000		36.000.000		36.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	10	10	15	36.000.000	15	36.000.000	15	36.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung							350.000.000		200.000.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pendidikan -		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Kantor dan Bangunan Lainnya *****																CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	1	350.000.000	1	200.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							250.000.000		100.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	1	250.000.000	1	100.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		100.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	100.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII, JAWA TENGAH KOTA MAGELANG MAGELANG OPD Provinsi TEMANGGUNG	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.659.500.000		1.639.500.000		1.499.500.000		1.439.500.000		1.489.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX ***	%	100	100	100	1.659.500.000	100	1.639.500.000	100	1.499.500.000	100	1.439.500.000	100	1.489.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	12	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Terlaksanaanya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																						REJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								756.000.000		756.000.000		756.000.000		756.000.000		756.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	756.000.000	100	756.000.000	100	756.000.000	100	756.000.000	100	756.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.00001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor *****							240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.06.00002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN IX		
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN IX		
						Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	N/A	N/A	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							yang Disediakan *****															REJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsult							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					asi SKPD *****																NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Terlaksanaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								220.000.000		100.000.000		60.000.000		0		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai asset di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	4	4	4	220.000.000	4	100.000.000	4	60.000.000	4	0	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							50.000.000		0		50.000.000		0		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	50.000.000	N/A	0	1	50.000.000	N/A	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																						Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							150.000.000		100.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	4	150.000.000	3	100.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							20.000.000		0		10.000.000		0		0	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	20.000.000	N/A	0	1	10.000.000	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.07.00008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersediaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					atau Bangunan Lainnya *****																YAH PENDIDIKAN IX		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								533.500.000		533.500.000		533.500.000		533.500.000		533.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	12	533.500.000	12	533.500.000	12	533.500.000	12	533.500.000	12	533.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.00001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	240.000.000	12	240.000.000	12	240.000.000	12	240.000.000	12	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	27.000.000	12	27.000.000	12	27.000.000	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.08.00004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							265.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					PENDIDIKAN IX		
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	265.000.000	12	265.000.000	12	265.000.000	12	265.000.000	12	265.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								120.000.000		220.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	120.000.000	1	220.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																						REJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	56	50.000.000	56	50.000.000	56	50.000.000	56	50.000.000	56	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penduk							0		100.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					ung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****																WILAYAH PENDIDIKAN IX		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	100.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX, JAWA TENGAH KEBUMEN OPD Provinsi PURWOREJO WONOSOBO	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRO									1.513.000.000		1.375.000.000		1.475.000.000		1.415.000.000		1.525.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			VINSI ***																				
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X ***	%	100	100	100	1.513.000.000	100	1.375.000.000	100	1.475.000.000	100	1.415.000.000	100	1.525.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Terlaksanany a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								595.000.000		585.000.000		605.000.000		615.000.000		585.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cabdin X ****	%	N/A	100	100	595.000.000	100	585.000.000	100	605.000.000	100	615.000.000	100	585.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.00001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangun							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					an Kantor *****																YAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							60.000.000		50.000.000		70.000.000		80.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	N/A	N/A	2	60.000.000	2	50.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							yang Disediakan *****																
		X.XX.01.1.06.00003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.06.00004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					YAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					PENDIDIKAN X		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								300.000.000		150.000.000		200.000.000		100.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	3	3	300.000.000	2	150.000.000	4	200.000.000	2	100.000.000	3	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							100.000.000		150.000.000		200.000.000		100.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	2	100.000.000	2	150.000.000	4	200.000.000	2	100.000.000	3	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							200.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	200.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					atau Bangunan Lainnya *****																YAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								438.000.000		460.000.000		490.000.000		520.000.000		560.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	12	12	438.000.000	12	460.000.000	12	490.000.000	12	520.000.000	12	560.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.00001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Terlaksanya Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	N/A	N/A	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Surat Menyurat	Menyurat *****														USAHA		
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleng							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan - CABA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					kapan Kantor *****																NG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.08.00004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							308.000.000		330.000.000		360.000.000		390.000.000		430.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	308.000.000	12	330.000.000	12	360.000.000	12	390.000.000	12	430.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	18	18	150.000.000	18	150.000.000	18	150.000.000	18	150.000.000	18	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.			Pemeliharaan Peralata							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		09.00 06			n dan Mesin Lainnya *****																dikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	SUBBAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUBBAGIAN TATA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X, JAWA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tetap Lainnya	Dipelihara *****														USAHA	TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN X		
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CILACAP OPD Provinsi PURBALINGGA	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									2.502.000.000		1.940.750.000		2.167.775.000		2.008.403.000		2.247.993.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI ***	%	100	100	100	2.502.000.000	100	1.940.750.000	100	2.167.775.000	100	2.008.403.000	100	2.247.993.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								15.000.000		15.000.000		15.000.000		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Terlaksanakannya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								579.500.000		584.500.000		589.500.000		594.500.000		599.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	100	579.500.000	100	584.500.000	100	589.500.000	100	594.500.000	100	599.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.00001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangun							17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					an Kantor *****																YAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	N/A	N/A	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
							yang Disediakan *****																
		X.XX.01.1.06.00003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.06.00004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					YAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					PENDIDIKAN XI		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	4	85.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							225.000.000		230.000.000		235.000.000		240.000.000		245.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	12	225.000.000	12	230.000.000	12	235.000.000	12	240.000.000	12	245.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								795.000.000		415.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	11	10	13	795.000.000	11	415.000.000	10	410.000.000	10	410.000.000	10	410.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							340.000.000		340.000.000		340.000.000		340.000.000		340.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	8	340.000.000	8	340.000.000	8	340.000.000	8	340.000.000	8	340.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		5.000.000		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	5.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					S WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							190.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	190.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							195.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					atau Bangunan Lainnya *****																YAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	195.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								645.000.000		646.000.000		680.000.000		717.300.000		758.230.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	12	12	645.000.000	12	646.000.000	12	680.000.000	12	717.300.000	12	758.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.00001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Terlaksananya Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	N/A	N/A	4	6.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000	4	9.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Surat Menyurat	Menyurat *****														USAHA	TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							330.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	330.000.000	12	330.000.000	12	363.000.000	12	399.300.000	12	439.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Pendidikan -		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Perlengkapan Kantor *****																CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								467.500.000		280.250.000		473.275.000		286.603.000		480.263.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	73	139	87	467.500.000	86	280.250.000	87	473.275.000	86	286.603.000	87	480.263.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.603.000		40.263.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	3	27.500.000	3	30.250.000	3	33.275.000	3	36.603.000	3	40.263.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	60	20.000.000	60	20.000.000	60	20.000.000	60	20.000.000	60	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	22	40.000.000	22	40.000.000	22	40.000.000	22	40.000.000	22	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan							190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Lainnya *****																YAH PENDIDIKAN XI		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	N/A	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							190.000.000		0		190.000.000		0		190.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanany a Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	1	190.000.000	N/A	0	1	190.000.000	N/A	0	1	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BREBES CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI, JAWA TENGAH KOTA TEGAL OPD Provinsi TEGAL	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									4.428.300.000		1.308.300.000		1.337.300.000		1.863.300.000		1.377.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XIICabang Dinas Wilayah Pendidikan XII ***	%	100	100	100	4.428.300.000	100	1.308.300.000	100	1.337.300.000	100	1.863.300.000	100	1.377.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Cabdin XII ****	Dokumen	2	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Terlaksanaya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																						NGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								578.000.000		578.000.000		598.000.000		618.000.000		628.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cadang Dinas XII ****	%	100	100	100	578.000.000	100	578.000.000	100	598.000.000	100	618.000.000	100	628.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN XII		
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediaya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersediaya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	24	5.000.000	24	5.000.000	24	5.000.000	24	5.000.000	24	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							250.000.000		250.000.000		270.000.000		290.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					IDIKAN XII		
						Terlaksanany a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	12	250.000.000	12	250.000.000	12	270.000.000	12	290.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								3.000.000.000		0		0		500.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan cabdin XII ****	Unit	1	6	4	3.000.000.000	1	0	N/A	0	N/A	500.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.07.00005			Pengadaan Mebel *****							500.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	1	500.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.07.00006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							500.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	2	500.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.			Pengadaan Aset Tetap							0		0		0		0		0	Dinas Pendi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		07.0007			Lainnya *****																dikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.07.00009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							2.000.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersediaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	2	2.000.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor							0		0		0		500.000.000		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					atau Bangunan Lainnya *****																YAH PENDIDIKAN XII		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	500.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								526.300.000		456.300.000		465.300.000		471.300.000		475.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cabdin XII ****	Laporan	12	12	12	526.300.000	12	456.300.000	12	465.300.000	12	471.300.000	12	475.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.08.00001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanaya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.08.00002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							135.000.000		135.000.000		142.000.000		145.000.000		147.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	135.000.000	12	135.000.000	12	142.000.000	12	145.000.000	12	147.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.08.00003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	6.500.000	12	6.500.000	12	6.500.000	12	6.500.000	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.08.00004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							380.000.000		310.000.000		312.000.000		315.000.000		317.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																					PENDIDIKAN XII		
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	380.000.000	12	310.000.000	12	312.000.000	12	315.000.000	12	317.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								294.000.000		244.000.000		244.000.000		244.000.000		244.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan cabdin XII ****	Unit	18	30	30	294.000.000	29	244.000.000	29	244.000.000	29	244.000.000	29	244.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.			Pemeliharaan Peralata							19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000	Dinas Pendi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		09.00 06			n dan Mesin Lainnya *****																dikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	20	19.000.000	20	19.000.000	20	19.000.000	20	19.000.000	20	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX. 01.1. 09.00 07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksanya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Terlaksanya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PEND		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					Lainnya *****																IDIKAN XII		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							50.000.000		0		0		0		0	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	1	50.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII, JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi PEKALONGAN PEMALANG	

Tabel 4.2

Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029

NO	PROGRAM DAERAH	RENCANA AKTIVITAS RIIL	OUTPUT/TARGET/ VOLUME*	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH KOLABORASI
1	(PA) Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja	Peningkatan kompetensi keahlian Guru sesuai DUDI	3.604 orang	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	-
		Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum yang selaras DUDI, berbasis STEAM, potensi serta Kearifan Lokal	60 dokumen	Program : Pengembangan Kurikulum Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Sub Kegiatan : Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Cabanag Dinas Wilayah Pendidikan I - XII	-
		Revitalisasi Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SMK	62 Paket	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan : Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Bidang Pembinaan SMK	-
2	(PP) Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran,	Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi SMA,SMK,SLB Negeri	11.011 GTT/PTT	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; - Pengelolaan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan : - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Cabanag Dinas Wilayah Pendidikan I - XII	-

NO	PROGRAM DAERAH	RENCANA AKTIVITAS RIIL	OUTPUT/TARGET/ VOLUME*	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH KOLABORASI
	untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi			- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah kejuruan - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		
		Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOSDA) bagi SMA,SMK,SLB Swasta	643.376 siswa	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; - Pengelolaan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan : - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah kejuruan - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Cabanag Dinas Wilayah Pendidikan I - XII	-
		Pemberian Beasiswa Lulusan SMA,SMK,MA Miskin yang Berprestasi ke Luar Negeri	100 siswa	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Bidang Pembinaan SMK	-
		Beasiswa bagi Siswa Miskin SMA, SMK, SLB (BSM)	75.000 siswa	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan :	Bidang Pembinaan SMA Bidang Pembinaan SMK Bidang Pembinaan Diksus	-

NO	PROGRAM DAERAH	RENCANA AKTIVITAS RIIL	OUTPUT/TARGET/ VOLUME*	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH KOLABORASI
				- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; - Pengelolaan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan : - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Pendidikan Khusus		
3	(PT) Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran, Akses Internet)	Paket Pendidikan Gratis Siswa SMA, SMK, SLB	425.799 siswa	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; - Pengelolaan Pendidikan Khsus Sub Kegiatan : - Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SMA) - Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SMK) - Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SLB)	Bidang Pembinaan SMA Bidang Pembinaan SMK Bidang Pembinaan Diksus	-
4	(PA) Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di	Revitalisasi Sarpras Pendidikan SMA/SMK Unggulan	10 ruang dan 10 paket	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan :	Bidang Pembinaan SMK Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I - XII	-

NO	PROGRAM DAERAH	RENCANA AKTIVITAS RIIL	OUTPUT/TARGET/ VOLUME*	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH KOLABORASI
	setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta			- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
		Upskilling Guru SMA / SMK Unggulan	3.604 orang	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	-
		Pengembangan kurikulum secara adaptif, berbasis muatan lokal	60 dokumen	Program : Pengembangan Kurikulum Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Sub Kegiatan : Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I - XII	-
5	(PT) Penanganan Bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Mewujudkan Satuan Pendidikan Zero Bullying, melalui: (a) Satuan pendidikan Paud, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang memiliki Satgas TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan). (b) Satuan pendidikan Paud, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang memiliki Juknis/SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.	49.992 sekolah (sekolah yang mempunyai TPPK)	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan : Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bidang Pembinaan Diksus	-

NO	PROGRAM DAERAH	RENCANA AKTIVITAS RIIL	OUTPUT/TARGET/ VOLUME*	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH KOLABORASI
6	(PT) Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa	Meningkatkan kualitas SLB di Jawa Tengah melalui : 1) Mendorong peran aktif layanan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat (SLB Swasta)kekerasan di Satpendik. 2) Sinkronsasi kebijakan dan regulasi tentang disabilitas khususnya layanan pendidikan melalui telaah regulasi 3) Peningkatan sarpras pendidikan SLB; 4) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) SLB Swasta berdasarkan akreditasi dan jumlah siswa; 5) Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi SLB Negeri	189 sekolah	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan : - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus - Pembangunan Unit Sekolah Baru - Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah - Pengadaan sarana mobilitas sekolah	Bidang Pembinaan Diksus Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I - XII	-
7	(PA) Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap kecamatan	Mewujudkan seluruh sekolah umum (SMA dan SMK) di Jawa Tengah adalah Sekolah Inklusi melalui :	680 sekolah	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Bidang Pembinaan Diksus	BPSDMD (Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri, Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, dan

NO	PROGRAM DAERAH	RENCANA AKTIVITAS RIIL	OUTPUT/TARGET/ VOLUME*	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH KOLABORASI
		1. Penyediaan sarpras ramah disabilitas pada sekolah inklusi 2. Peningkatan kapasitas Guru Pendamping Khusus (GPK) di Sekolah Inklusi (kerjasama dengan BPSDMD)				Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis)

Keterangan* : Target akhir renstra 2030

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	TUJUAN									
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,85	12,86	12,97	13,03	13,09	13,15	13,21	13,29	
2	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	73,57	55,95	65,01	70,12	72,11	74,01	76,51	80,1	
	SASARAN									
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Th	70,81	71,6	72,24	72,88	73,53	74,16	74,8	75,45	
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 th Penyandang Disabilitas	N/A	56,7	65,36	74,02	75,11	76,2	77,29	78,38	
3	% Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yg mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk literasi dan numerasi.	35,79	61,09	62,95	64,95	66,95	68,45	69,95	70,95	
4	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,52	89,88	90,38	90,88	91,38	91,88	92,38	92,88	
5	Indeks Manajemen Risiko	3,1	3,013	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	3.31	3,35	3,37	3,39	3,40	3,45	3,50	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja Kunci	Baseline		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	70,81	71,6	72,24	72,88	73,53	74,16	74,8	75,45	

2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	N/A	56,7	65,36	74,02	75,11	76,2	77,29	78,38	

Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan sebagaimana kewenangan provinsi, terdiri dari:

a. Pendidikan Menengah

b. Pendidikan Khusus

Adapun penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sedangkan pada Pendidikan Khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi peserta didik secara berkualitas, terukur, cepat dan terjangkau. Pada tahun 2024 terdapat 8 indikator prioritas provinsi, yaitu angka partisipasi sekolah, kompetensi literasi, kompetensi numerasi, tingkat penyerapan lulusan SMK, tingkat kepuasan dunia kerja terhadap lulusan SMK, iklim keamanan, iklim kebhinekaan, dan iklim inklusivitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap pelayanan SPM pendidikan mencakup 2 jenis layanan, yaitu: Pendidikan Menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); serta Pendidikan Khusus.

Berdasarkan hal tersebut berikut tabel Indikator Stndar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tabel 4.4

Indikator Standar Pelayanan (SPM) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	JENJANG	Baseline		Target Capaian Tahun					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	A.1 Kemampuan Literasi	SMA	77,56	81,07	81,67	82,27	82,87	83,47	84,07	84,67
2	A.1 Kemampuan Literasi	SMK	70,37	73,01	74,31	75,61	76,91	78,21	79,51	80,81
3	A.1 Kemampuan Literasi	SDLB	67,87	71,58	73,18	74,78	76,38	77,98	79,58	81,18
4	A.1 Kemampuan Literasi	SMPLB	64,91	72,83	73,33	73,83	74,33	74,83	75,33	75,83
5	A.1 Kemampuan Literasi	SMALB	61,3	72,42	72,92	73,42	73,92	74,42	74,92	75,42

NO	INDIKATOR	JENJANG	Baseline		Target Capaian Tahun					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	A.2 Kemampuan Numerasi	SMA	64,54	68,13	69,73	71,33	72,93	74,53	76,13	77,73
7	A.2 Kemampuan Numerasi	SMK	59,07	61,57	63,77	65,97	68,17	70,37	72,57	74,77
8	A.2 Kemampuan Numerasi	SDLB	64,28	71,27	71,87	72,47	73,07	73,67	74,27	74,87
9	A.2 Kemampuan Numerasi	SMPLB	65,38	70,68	70,93	71,18	71,43	71,68	71,93	72,18
10	A.2 Kemampuan Numerasi	SMALB	56,74	68,36	68,86	69,36	69,86	70,36	70,86	71,36
11	A.4 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	SMK	89,32	89,98	90,52	91,16	91,8	92,43	93,07	93,71
12	A.6 Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	SMK	80,23	81,75	82,29	82,83	83,37	83,91	84,45	84,99
13	B.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 - 18	Umum	70,87	71,6	72,24	72,88	73,52	74,16	74,8	75,45
14	B.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 - 18 Penyandang Disabilitas	Umum	56,7	56,7	65,36	74,02	75,11	76,2	77,29	78,38
15	D.10 Iklim inklusivitas	SMA	62,49	64,65	66,15	67,65	69,15	70,65	72,15	73,65
16	D.10 Iklim inklusivitas	SMK	58,37	59,04	61,34	63,64	65,94	68,24	70,54	72,84
17	D.10 Iklim inklusivitas	SDLB	61,59	64,45	71,57	72,87	74,17	75,47	76,77	78,07
18	D.10 Iklim inklusivitas	SMPLB	66,74	59,04	70,63	72,03	73,43	74,83	76,23	77,63
19	D.10 Iklim inklusivitas	SMALB	62,39	70,27	71,34	72,94	74,54	76,14	77,74	79,34
20	D.4 Iklim Keamanan	SMA	74,67	69,74	85,54	86,74	87,94	89,14	90,34	91,54
21	D.4 Iklim Keamanan	SMK	70,8	74,62	71,7	72,9	74,1	75,3	76,5	77,7
22	D.4 Iklim Keamanan	SDLB	75,56	70,5	79,55	80,05	80,55	81,05	81,55	82,05
23	D.4 Iklim Keamanan	SMPLB	72,4	79,05	75,75	76,95	78,15	79,35	80,55	81,75
24	D.4 Iklim Keamanan	SMALB	69,34	74,12	75,42	76,72	78,02	79,32	80,62	81,92
25	D.8 Iklim Kebinekaan	SMA	76,43	74,17	75,17	76,17	77,17	78,17	79,17	80,17
26	D.8 Iklim Kebinekaan	SMK	72,77	70,09	71,39	72,69	73,99	75,29	76,59	77,89
27	D.8 Iklim Kebinekaan	SDLB	67,31	72,93	73,93	74,93	75,93	76,93	77,93	78,93
28	D.8 Iklim Kebinekaan	SMPLB	67,19	73,12	74,92	76,72	78,52	80,32	82,12	83,92
29	D.8 Iklim Kebinekaan	SMALB	67,7	73,9	75,9	77,9	79,9	81,9	83,9	85,9

JAWA-TENGAH
PRASETYA ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yang akan menjadi panduan penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, khususnya yang terkait dan fokus pada urusan pendidikan. Terdapat substansi penting yang perlu mendapatkan perhatian guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain : dalam Perwujudan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter.

Pada sisi konsistensi, maka Rencana strategis harus mampu menjadi instrument utama dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, kemudian pada sisi keberlanjutan harus mampu mencerminkan gambaran tahapan setiap upaya pencapaian tujuan, dan fokus/prioritas menggambarkan orientasi perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan harus terkonsentrasi pada upaya penyelesaian permasalahan yang telah teridentifikasi dan terpetakan, sedangkan kepekaan terhadap perubahan lingkungan strategis maupun terhadap perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika lingkungan global dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan tersebut, serta harus mampu menangkap dan memanfaatkan setiap peluang yang tercipta akibat dari adanya perubahan.

Dipahami pula bahwa dalam kerangka penyelenggaraan program/kegiatan terdapat faktor penting yang akan sangat memberikan dampak terhadap pencapaian target kinerja. Faktor ini adalah ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan selaras dengan target kinerja. Kondisi yang mungkin terjadi adalah tidak terpenuhinya anggaran akibat ketersediaan anggaran yang terbatas atau belum sesuai dengan perencanaan awal. Pada kondisi ini, maka hal yang patut menjadi perhatian adalah penetapan distribusi anggaran secara cermat dan tepat sesuai target utama/prioritas yang berdampak langsung terhadap layanan publik yang disertai dengan upaya pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien, serta dengan menggali dan mengarahkan setiap sumber daya yang dimungkinkan untuk mendorong pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini akan dapat diwujudkan dengan baik dengan dukungan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, yang disertai kesadaran bahwa pemahaman terhadap layanan penyelenggaraan pembangunan pendidikan menjadi bagian kerja bersama untuk mencapa tujuan yang telah ditetapkan.

Meningkatkan kualitas SDM Jawa Tengah
IK: Indeks Modal Manusia (IMM)

Meningkatnya kualitas pendidikan
IK: Harapan Lama Sekolah (HLS)

Meningkatnya kualitas guru
IK: % Guru bersertifikat pendidik; % Guru SMK bersertifikat keahlian

- **Tersedianya Lembaga Sertifikasi yang memadai**
  IK: Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi yang profesional
- **Meningkatnya kerjasama multipihak**
  IK: Jumlah kerjasama multipihak dalam peningkatan kompetensi guru

Meningkatnya kualitas sarpras
IK: % Sarpras pendidikan kondisi baik

- **Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan bantuan sarpras pendidikan**
  IK: Jumlah DAK Fisik yang diterima
- **Meningkatnya pengembangan sumber pembiayaan nn pemerintah**
  IK: Jumlah CSR/Swasta yang memberikan bantuan sarpras pendidikan

Meningkatnya pendidikan karakter
IK: Nilai Karakter Siswa

- **Meningkatnya peran keluarga/orang tua dalam penanaman dan pembiasaan karakter**
  IK: Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
  - **Meningkatnya komunikasi dan interaksi dalam keluarga**
    IK: Nilai Berinteraksi setiap hari
  - **Menurunnya konflik dalam keluarga**
    IK: Konflik antar anggota keluarga
- **Meningkatnya peran dan kreativitas guru dalam proses pembelajaran pendidikan karakter**
  IK: ~~Jumlah Guru Penggerak~~
- **Meningkatnya internalisasi budaya dan kearifan lokal**
  IK: Jumlah sekolah yang mengarustamakan budaya dan kearifan lokal
  - **Meningkatnya pengembangan kompetensi muatan lokal**
    IK: Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan muatan lokal pilihan

Meningkatnya implementasi kurikulum yang adaptif dan inovatif
IK: Nilai Pengelolaan Kurikulum Satuan Pendidikan

- **Meningkatnya pengembangan kompetensi muatan lokal**
  IK: Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan muatan lokal pilihan
- **Meningkatnya pemanfaatan digital dalam proses pembelajaran**
  IK: % Guru SMA,SMK,dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan

Meningkatnya relevansi pendidikan
IK: Tingkat Penyerapan Lulusan SMK

- **Meningkatnya kompetensi dan keahlian Guru SMK selaras DUDI**
  IK: Jumlah Guru SMK dengan sertifikat keahlian selaras DUDI
- **Meningkatnya kompetensi siswa selaras DUDI**
  IK: Jumlah siswa SMK yg memperoleh sertifikat kompetensi
- **Meningkatnya alat praktik/peraga SMK sesuai dengan kompetensi keahlian**
  IK: Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian
- **Meningkatnya kerjasama SMK dengan DUDI**
  IK: Jumlah SMK yang bekerjasama dengan DUDI yang menyerap lulusan SMK

Meningkatnya tata kelola pendidikan
IK: % Sekolah terakreditasi minimal B; Nilai Kualitas Pembelajaran

- **Meningkatnya kepemimpinan instruksional**
  IK: Nilai Kepemimpinan Instruksional
- **Meningkatnya refleksi pembelajaran oleh Guru**
  IK: Nilai Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru
- **Meningkatnya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah**
  IK: % Seklah yang memperoleh pembinaan kelembagaan dan manajemen

Meningkatnya partisipasi pendidikan
IK: Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Meningkatnya akses layanan pendidikan secara merata
IK: Angka Partisipasi Kasar (APK)

Meningkatnya konektivitas wilayah yang memadai

IK: Jalan dalam kondisi mantap; Jumlah angkutan desa tersedia.

Meningkatnya ketersediaan biaya pendidikan yang terjangkau

IK: Cakupan siswa miskin memperoleh keringanan biaya

Meningkatny ketersediaan alternatif layanan pendidikan yang fleksible

IK: Jumlah sekolah virtual; Jumlah kelas jauh

Meningkatnya kualitas layanan pendidikan non formal

IK: Jumlah PKBM yang terakreditasi minimal B

Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan pada kecamatan minim layanan

IK: Jumlah USB terbangun pada wilayah minim layanan

Meningkatnya pemerataan guru dna tenaga kependidikan

IK: Indeks Distribusi Guru

Meningkatnya ketersediaan sarpras pendidikan secara merata

IK: Indeks Fasilitas Pendidikan

Meningkatnya peran keluarga/orang tua
IK: Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)

Meningkatnya komunikasi dan interaksi dalam keluarga

IK: Nilai Berinteraksi setiap hari

Menurunnya konflik dalam keluarga

IK: Konflik antar anggota keluarga

Menurunnya Anak Tidak Sekolah (ATS)
IK: Jumlah ATS; Jumlah D.O; Jumlah LTM

Menurunnya anak bekerja/pekerja anak

IK: Jumlah anak bekerja/pekerja anak

Menurunnya pernikahan anak

IK: Jumlah pernikahan anak

Menurunnya kasus hukum pada anak-anak

IK: Jumlah anak Berhadapan Hukum (ABH)

Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat

IK: Angka Kemiskinan

TUJUAN	
Indikator	
SASARAN	**S.1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus**
Indikator	**(1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Th** **(2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 th Penyandang Disabilitas**

SASARAN PROGRAM/PROGRAM	**SS1.1 Meningkatnya pemerataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus (P1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											
Indikator	APK SMA				APK SMK				APK SLB			
Kepala Bidang	**Kabid SMA**				**Kabid SMK**				**Kabid SLB**			
Definisi Operasional												
SASARAN KEGIATAN/ KEGIATAN	Terpenuhinya daya tampung SMA secara merata **1.01.02.1.01. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA**				Terpenuhinya daya tampung SMK secara merata **1.01.02.1.02. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK**				Terpenuhinya daya tampung SLB secara merata **1.01.02.1.03. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus**			
Indikator	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA				Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK				Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB			
Kasi/JF/Pelaksana	**JF/Pelaksana SMA**				**JF/Pelaksana SMK**				**JF/Pelaksana SLB**			
SUB KEGIATAN	Sekolah Baru yang Terbangun **1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)**	Ruang Kelas Baru Bertambah **1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium,**	**Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembangunan Ruang Laboratorium, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	Sekolah Baru yang Terbangun **1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)**	Ruang Kelas Baru Bertambah **1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah**	**Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Ruang Praktik Siswa Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Laboratorium, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	Sekolah Baru yang Terbangun **1.01.02.1.03.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)**	Ruang Kelas Baru Bertambah **1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah**	**Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**
Indikator	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah , Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU,Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, UKS, Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Laboratorium yang Telah Dibangun, Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia, Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah , Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU,Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, RPS, UKS, Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Laboraorium yang Telah Dibangun, Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia, Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah , Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU,Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, RPS, UKS, Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, yang Telah Dibangun, Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia, Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia

SASARAN PROGRAM/PROGRAM	**SS1.2. Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan (P1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								
Indikator	Angka Putus Sekolah SMA		Angka Putus Sekolah SMK		Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding	Angka Putus Sekolah SLB			
Kepala Bidang	**Kabid SMA**		**Kabid SMK**		**Ka Cabdin I-XIII**	**Kabid SLB**			
SASARAN KEGIATAN/ KEGIATAN	Tersedianya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan menengah atas **1.01.02.1.01. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA**		Tersedianya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan menengah kejuruan **1.01.02.1.02. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK**			Tersedianya bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin pendidikan khusus **1.01.02.1.03. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus**		Tersedianya sarana mobilitas sekolah **1.01.02.1.03. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus**	
Indikator	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah		Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding	Jumlah Peserta Didik Sekolah Pendidikan Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	
Kasi/JF/Pelaksana	**SMA**		**SMK**		**Kasi Cabdin**	**SLB**		**SLB**	
SUB KEGIATAN	Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik **1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas**	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia **1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah**	Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik **1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan**	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia **1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah**	Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik **1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan**	Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik **1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Luar Biasa**	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia **1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah**	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia **1.01.02.1.03.0039 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah**	
Indikator	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (BSM)	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (BSM)	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Perlengkapan Sekolah)	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Boarding+Semi Boarding)	Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	

SASARAN PROGRAM/PROGRAM	**SS1.3. Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan (P2) PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	
Indikator	% Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah	% Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus
Kepala Bidang	**Ka CABDIN I-XIII**	
SASARAN KEGIATAN/ KEGIATAN	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SMA dan SMK **1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengendalian usulan perijinan pendidikan SLB **1.01.05.1.02.0001 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**
Indikator	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus
Kasi/JF/Pelaksana	**SMA** / **SMK**	**SLB**
SUB KEGIATAN	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat **1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**
Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

SASARAN PROGRAM/PROGRAM	**SS1.4. Meningkatnya distribusi pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan (P3) PROGRAM PENDIDIK DAN KETENAGAPENDIDIKAN**	
Indikator	Indeks Distribusi Guru SMA, SMK	Indeks Distribusi Guru SLB
Kepala Bidang	**Kabid Ketenagaan**	
SASARAN KEGIATAN/ KEGIATAN	Terlaksananya Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Khusus **1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	
Indikator	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah yang didistribusikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus yang didistribusikan
Kasi/JF/Pelaksana	**Ketenagaan**	
SUB KEGIATAN	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus **1.01.04.1.01.002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus**	
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Laporan)	

Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua

Harapan Lama Sekolah (HLS)

S.2. Meningkatnya Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus

(3) % Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yg mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk literasi dan numerasi

SS2.1. Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan (P1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	SS2.2. Meningkatnya karakter siswa (P1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				SS2.3 Meningkatnya digitalisasi pendidikan (P1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
% Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam Kondisi Baik	% Prestasi Lomba SMA Tingkat Nasional	% Prestasi Lomba SMK Tingkat Nasional	% Prestasi Lomba SLB Tingkat Nasional	% Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik	% Guru SMA,SMK,dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan			% Guru SMA Bersertifikat Kompetensi Pendidik
Ka CABDIN I-XII	Kabid SMA	Kabid SMK	Kabid SLB	Ka Cabdin I-XII	Ka BPTK			
Tersedianya sarpras pendidikan SMA kondisi baik **1.01.02.1.01. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA**	Tersedianya sarpras pendidikan SMK kondisi baik **1.01.02.1.02. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK**		Tersedianya sarpras pendidikan khusus kondisi baik **1.01.02.1.03. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Berkembangnya potensi siswa SMA **1.01.02.1.01. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA**	Berkembangnya potensi siswa SMK **1.01.02.1.02. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK**	Berkembangnya potensi siswa SLB **1.01.02.1.03. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Terciptanya iklim inklusivitas SMA **1.01.02.1.01. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA**	Terciptanya iklim inklusivitas SMK **1.01.02.1.02. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK**	Terciptanya iklim inklusivitas SLB **1.01.02.1.03. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Termanfaatkannya platform pendidikan SMA **1.01.02.1.01. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA**	Termanfaatkannya platform pendidikan SMK **1.01.02.1.02. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK**	Termanfaatkannya platform pendidikan SLB **1.01.02.1.03. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SLB**	Tersedianya Guru dan Tenaga Kependidikan SMA yang Memiliki Sertifikat Kompetensi **1.01.02.1.01. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA**
Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik	Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik		Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik	Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional	Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional	Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional	Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan	Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan	Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan	Jumlah guru SMA yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan	Jumlah guru SMK yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan	Jumlah guru SLB yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang Bersertifikat Kompetensi
SMA	SMK		SLB	SMA	SMK	SLB	KASI ...		KASI ...	SMA	SMK	SLB	
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat **1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah; Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah,**	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pembangunan Ruang Laboratorium; Pembangunan Ruang UKS; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	**1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah; Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah,**	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pembangunan Ruang Laboratorium; Pembangunan Ruang Praktik Siswa; Pembangunan Ruang UKS; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	**1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah; Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah,**	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pembangunan Ruang UKS; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik **1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**	Tertayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi **1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi**	Tertayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi **1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi**	Tertayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi **1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi**	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan **1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan**	Terlaksananya Konten Digital untuk Pendidikan yang dikembangkan **1.01.02.1.01.0058 Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan**	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan **1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan**	Terlaksananya Konten Digital untuk Pendidikan yang dikembangkan **1.01.02.1.02.0051 Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan**	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan **1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan**	Terlaksananya Konten Digital untuk Pendidikan yang dikembangkan **1.01.02.1.03.0057 Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan**	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan **1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU; Ruang Laboratorium Fisika; Kimia; Komputer; Bahasa; Kesehatan Sekolah; Sarpras dan Utilitas sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah .... yang Telah Dibangun; Jumlah ... yang Tersedia	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU; Ruang Laboratorium Fisika; Kimia; Komputer; Bahasa; Kesehatan Sekolah; Sarpras dan Utilitas sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah .... yang Telah Dibangun; Jumlah ... yang Tersedia	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU; Ruang Laboratorium Fisika; Kimia; Komputer; Bahasa; Kesehatan Sekolah; Sarpras dan Utilitas sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah .... yang Telah Dibangun; Jumlah ... yang Tersedia	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Konten Digital untuk Pendidikan yang telah dikembangkan (oleh BPTIK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Konten Digital untuk Pendidikan yang telah dikembangkan (oleh BPTIK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Konten Digital untuk Pendidikan yang telah dikembangkan (oleh BPTIK)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan

S3. Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan

(4) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK

% Guru SMK Bersertifikat Kompetensi Pendidik	% Guru SLB Bersertifikat Kompetensi Pendidik
Bidang Ketenagaan	
Tersedianya Guru dan Tenaga Kependidikan SMK yang Memiliki Sertifikat Kompetensi **1.01.02.1.02. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK**	Tersedianya Guru dan Tenaga Kependidikan SLB yang Memiliki Sertifikat Kompetensi **1.01.02.1.03. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SLB**
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang Bersertifikat Kompetensi
	SLB
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan **1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1.01.02.1.02.0073 **Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan

SS2.5 Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan
(P1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

% Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B			Nilai Kualitas Pembelajaran SMA		Nilai Kualitas Pembelajaran SMK		Nilai Kualitas Pembelajaran SLB	
Ka CABDIN I-XIII			**Kabid SMA**		**Kabid SMK**		**Kabid SLB**	
Terwujudnya satuan pendidikan SMA dengan manajemen pengelolaan yang baik **1.01.02.1.01. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA**	Terwujudnya satuan pendidikan SMK dengan manajemen pengelolaan yang baik **1.01.02.1.02. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK**	Terwujudnya satuan pendidikan SLB dengan manajemen pengelolaan yang baik **1.01.02.1.03. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SLB**	Terwujudnya pengelolaan satuan pendidikan SMA dengan baik **1.01.02.1.01. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA**		Terwujudnya pengelolaan satuan pendidikan SMK dengan baik **1.01.02.1.02. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK**		Terwujudnya pengelolaan satuan pendidikan khusus dengan baik **1.01.02.1.03. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SLB**	
Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik	Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik	Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik	Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA		Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK		Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB	
Kasi		**Kasi ....**	**SMA**		**SMK**		**SLB**	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas **1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas**	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan **1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan**	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus **1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus**	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan **Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus **Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas**	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan **Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan **Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan**	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan **Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus **Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus**
Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (sekolah)	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (sekolah)	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (sekolah)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS

SS2.6. Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif
(P4) PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

% Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan		
Ka CABDIN I-XIII		
Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Adaptif dan Inovatif **1.01.03.1.01 Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**		Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Adaptif dan Inovatif **1.01.03.1.02 Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**
Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan		Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan
SMA	**SMK**	**SLB**
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah **1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah**		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus **1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus**
Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun (dokumen)		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun (dokumen)

SS3.1. Meningkatnya kompetensi Guru berlisensi (P1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	SS3.2. Meningkatnya kualitas pembelajaran selaras DUDI (P1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
% Guru SMK yang Memiliki Sertifikat keahlian	Nilai Kualitas Pembelajaran selaras dunia kerja	
Kabid KETENAGAAN	**Kabid SMK**	
Tersedianya pendidik SMK memiliki keahlian selaras DUDI **1.01.02.1.02. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK**	Terlaksananya proses pembelajaran kejuruan selaras DUDI **1.01.02.1.02. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK**	
Pendidik SMK yang mendapat sertifikat keahlian	Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI	Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian
KETENAGAAN	**SMK**	
Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi **1.01.02.1.02.0056 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK**	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi **1.01.02.1.02.0060 Fasilitasi sertifikasi kompetensi peserta didik**	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia **1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**
Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia

LAMPIRAN

MANAJEMEN RISIKO PERANGKAT DAERAH

a. Identifikasi Risiko

TUJUAN/SASARAN STARTEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RISIKO	KATEGORI RISIKO	SEBAB	DAMPAK	
					URAIAN	PIHAK YANG TERKENA
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Th 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 th Penyandang Disabilitas	Aspek politis yang tidak selaras dengan kebijakan pendidikan	Risiko Kebijakan	Usulan pemerataan akses seperti pembangunan USB pembangunan sarpras sesuai dengan kepentingan kelompok	Pemerataan akses layanan terfokus hanya di beberapa Lokasi dengan kategori lokasi tersebut tidakmasuk wilayah blank spot	Masyarakat
		Kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru	Risiko Operasional	Intervensi/pemaksaan dari orang tua untuk memilih sekolah Favorit	Ketimpangan Kualitas siswa pada setiap sekolah yang ada di Jawa Tengah Terganggunya Kredibilitas Sekolah dan Pemerintah Daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	% Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk literasi dan numerasi	Keengganan guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	Risiko Operasional	Tidak adanya inovasi pembelajaran	Siswa kurang inovasi dan kurang menangkap perkembangan zaman	Siswa
		Keengganan siswa melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	Risiko Operasional	- Tidak adanya kebijkan ujian nasional - Keengganan orang tua untu mendampingi anaknya belajar	Literasi dan numerasi siswa rendah	Siswa
Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Kerjasama multipihak tidak terjadi	Risiko Kemitraan	Penjurusan SMK sudah majemuk	Terbatasnya DUDI yang melakukan Kerjasama dengan SMK	Siswa

b. Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala / Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Aspek politis yang tidak selaras dengan kebijakan pendidikan	3	4	12	Ada	Pemetaan wilayah blank spot dan melakukan inovasi untuk perluasan akses	Belum Memadai	2	4	8
Kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru	5	4	20	Ada	Sosialisasi SPMB serta membangun kemitraan dengan kab/kota	Belum Memadai	4	4	16
Keengganan guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	3	4	12	Ada	Penerapan mapel pilihan untuk mendukung sekolah unggulan	Belum Memadai	3	4	12
Keengganan siswa melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	3	4	12	Ada	Penerapan mapel pilihan untuk mendukung sekolah unggulan Forum guru dan wali murid	Belum Memadai	3	4	12
Kerjasama multipihak tidak terjadi	3	4	12	Ada	Identifikasi penjurusan SMK yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman	Belum Memadai	3	4	12

c. Daftar Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Aspek politis yang tidak selaras dengan kebijakan pendidikan	12	Dinas Pendidikan	Usulan pemerataan akses seperti pembangunan USB pembangunan sarpras sesuai dengan kepentingan kelompok	Pemerataan akses layanan terfokus hanya di beberapa Lokasi dengan kategori lokasi tersebut tidakmasuk wilayah blank spot
Kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru	20	Dinas Pendidikan	Intervensi/pemaksaan dari orang tua untuk memilih sekolah Favorit	Ketimpangan Kualitas siswa pada setiap sekolah yang ada di Jawa Tengah Terganggunya Kredibilitas Sekolah dan Pemerintah Daerah
Keengganan guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	12	Dinas Pendidikan	Tidak adanya inovasi pembelajaran	Siswa kurang inovasi dan kurang menangkap perkembangan zaman
Keengganan siswa melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	12	Dinas Pendidikan	- Tidak adanya kebijkan ujian nasional - Keengganan orang tua untu mendampingi anaknya belajar	Literasi dan numerasi siswa rendah
Kerjasama multipihak tidak terjadi	12	Dinas Pendidikan	Penjurusan SMK sudah majemuk	Terbatasnya DUDI yang melakukan Kerjasama dengan SMK

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

TUJUAN/SASARAN STARTEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RISIKO	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Th 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 th Penyandang Disabilitas	Aspek politis yang tidak selaras dengan kebijakan pendidikan	12	Usulan pemerataan akses seperti pembangunan USB pembangunan sarpras mendasarkan pada usulan Kepala Daerah tertentu	Pemerataan akses layanan terfokus hanya di beberapa Lokasi dengan kategori lokasi tersebut tidakmasuk wilayah blank spot	Pemetaan wilayah blank spot dan melakukan inovasi untuk perluasan akses	Dinas Pendidikan	2025 - 2030
		Kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru	20	Intervensi/pemaksaan dari orang tua untuk memilih sekolah Favorit	Pemerataan akses dan kualitas pendidikan tidak merata, sehingga adanya eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri	Sosialisasi SPMB serta membangun kemitraan dengan kab/kota	Dinas Pendidikan	2025 - 2030
Meningkatnya Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	% Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk literasi dan numerasi	Keengganan guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	12	Tidak adanya inovasi pembelajaran	Siswa kurang inovasi dan kurang menangkap perkembangan zaman	Penerapan mapel pilihan untuk mendukung sekolah unggulan	Dinas Pendidikan	2025 - 2030
		Keengganan siswa melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	12	- Tidak adanya kebijkan ujian nasional - Keengganan orang tua untu mendampingi anaknya belajar	Literasi dan numerasi siswa rendah	Forum guru dan wali murid	Dinas Pendidikan	2025 - 2030

TUJUAN/SASARAN STARTEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RISIKO	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Kerjasama multipihak tidak terjadi	12	Penjurusan SMK sudah majemuk	Terbatasnya DUDI yang melakukan Kerjasama dengan SMK	Identifikasi penjurusan SMK yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman	Dinas Pendidikan	2025 - 2030

e. Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan	APK SMA. SMK, SLB	Sarpras di wilayah pinggiran dalam kondisi kurang layak	9	Akses ke lokasi tidak terjangkau	Layanan pendidikan kurang optimal karena tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang layak dan memadai	Pembangunan dan / atau rehabilitasi sarpras rusak berat di wilayah pinggiran melalui dana APBD/APBN	Kepala Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan	6 bulan setiap tahun
Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	APS 16-18 tahun	Meningkatnya angka putus sekolah dan/atau tidak sekolah, serta angka pengangguran	12	Layanan pendidikan terbatas	Angka pengangguran meningkat	Intervensi ATS melalui PPDB yaitu jalur afirmasi dengan data berdasarkan SIK DJ (aplikasi dari Dinsos Prov. Jateng)	Kepala Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan	Bulan Mei - Juni tiap dilaksanakan PPDB

DINAS KESEHATAN

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap warga negara dalam mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menjadi aturan pelaksana dari UU Kesehatan, mengatur berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN tahap kelima ini mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, berdaya saing, dan berkarakter. Renstra ini bertujuan untuk mendukung pencapaian visi "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045" melalui pembangunan kesehatan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga mengacu pada berbagai regulasi terkait lainnya seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, serta Rancangan Akhir Renstra Kementerian Kesehatan. Dokumen ini dirancang untuk memberikan arah strategis bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tingkat provinsi yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memiliki kemanfaatan yang signifikan bagi pelayanan di Dinas Kesehatan termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Rumah Sakit Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-

program kesehatan sehingga semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan jangka menengah dan kebijakan nasional. Dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas, Renstra diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah dan fasilitas kesehatan lainnya, serta mendukung tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di bawah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian, dengan direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Model kelembagaan ini memperkuat tata kelola dan efektivitas layanan, memungkinkan rumah sakit untuk lebih mandiri, cepat dalam pengambilan keputusan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendukung pencapaian target strategis Renstra secara menyeluruh

Selain itu, Renstra ini mendorong sinergi antara berbagai program kesehatan di tingkat daerah dan nasional. Hal ini memfasilitasi kolaborasi antara Dinas Kesehatan, UPT, Rumah Sakit Daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas bagi Dinas Kesehatan dalam melaporkan kinerja kepada pemerintah daerah dan masyarakat sehingga menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program kesehatan.

Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan tantangan lokal di Jawa Tengah seperti dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di provinsi ini hingga tahun 2029. Dokumen ini juga akan menjadi bagian dari kontrak kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit dengan Kepala Daerah untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

1. Landasan idiil yaitu Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945.
2. Landasan Operasional
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.
k. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang mengatur struktur organisasi dan fungsi Dinas Kesehatan.
l. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penjabaran operasional dari Peta Jalan Kesehatan Untuk Semua Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Renstra ini memberikan arah dan panduan yang lebih rinci dan terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan kesehatan selama lima tahun ke depan, selaras dengan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan. Renstra ini juga dimaksudkan untuk memastikan adanya kesinambungan dan sinergitas antara perencanaan jangka panjang dengan implementasi program-program kesehatan yang konkret di lapangan, sehingga tujuan "Kesehatan Untuk Semua" dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-

2029 bertujuan untuk:

a. **Mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Berkualitas**: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh

masyarakat Jawa Tengah, tanpa terkecuali, melalui penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. **Memastikan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan**: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya kesehatan, termasuk sumber daya manusia, anggaran, fasilitas kesehatan, dan teknologi kesehatan, melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang akuntabel, dan evaluasi yang komprehensif.
c. **Memperkuat Kemitraan dan Kolaborasi**: Memperkuat kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan kesehatan, melalui koordinasi yang baik, pembagian peran yang jelas, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
d. **Menyediakan Pedoman Implementasi Pembangunan Kesehatan Lima Tahunan**: Menjadi pedoman substantif bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta seluruh jajaran di tingkat kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan kesehatan lima tahunan yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, sehingga tercipta keselarasan dan kesinambungan program kesehatan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang mencakup sumber daya manusia,

asset/modal dan unit usaha yang mash aktif berjalan, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan dan Rumah sakit pada periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2025-2029, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi, struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan Kesehatan dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi, dan/atau indkator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Subbab ini berisi tentang permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi sesuai dengan tupoksi masing-masing.

2.5 Isu Strategis Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Isu strategis tidak selalu merupakan permasalahan perangkat daerah, namun bisa juga merupakan potensi atau tantangan yang akan dihadapi oleh perangkat daerah ke depan dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis perangkat daerah memperhatikan lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang mempengaruhi perangkat daerah langsung maupun tidak langsung. Merumuskan isu strategis ini disimpulkan dari:

a. Permasalahan perangkat daerah yang merupakan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
b. Isu strategis lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang menjadi tantangan perangkat daerah ke depan yang bersumber dar1:
   1) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
   2) Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kesehatan dan RS Provinsi;
   3) Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan dan RS Provinsi;
   4) Hasil penjaringan masukan *stakeholder* oleh perangkat daerah.
c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode perumusan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Kesehatan dan RS Provinsi.

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Pada bagian ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan dan RS Provinsi, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran didapatkan dari kertas kerja *cascading* perangkat daerah yang telah disusun sebelumnya. Cara merumuskan dan menyajikan narasi tujuan dan sasaran sebagai berikut.

a. Tujuan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Tujuan perangkat daerah merupakan penyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap perangkat daerah. Tujuan perangkat daerah harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap perangkat daerah. Serta tujuan merupakan *ultimate outcome* dari perangkat daerah yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan.

Perumusan tujuan dapat dilakukan dengan membalikkan penyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi kalimat positif yang ringkas.

Pernyataan tujuan merupakan kalimat aktif, dimulai dengan kata kerja yang menjelaskan arah keinginan/preferensi dan satu kata benda yang menjelaskan obyek yang menjadi menjadi fokus perhatian.

Dalam menentukan tujuan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur dan target selama lima tahun kedepan. Pernyataan tujuan dijabarkan dalam 1 (satu) atau lebih sasaran perangkat daerah.

b. Sasaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Sasaran perangkat daerah merupakan kondisi hasil yang diharapkan agar tujuan dapat tercapai, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta berdasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap perangkat daerah. Pernyataan sasaran merupakan kalimat kondisi atau yang menggambarkan kondisi, dan disusun dengan diawali dengan kata seperti meningkatnya atau menurunnya.

Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level perangkat daerah (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *intermediate outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan perangkat daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan strategi

dan arah kebijakan memperhatikan pohon kinerja dan *cascading* yang sudah disusun, .

3.3 Manajemen Risiko Strategis Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya. Proses manajemen risiko seluruhnya dituangkan dalam lampiran Renstra PD.

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Subbag ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Selain penjabaran dan penjelasan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, dalam subbab ini juga dijelaskan sub kegiatan yang mendukung program-program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab III. Selain IKU Dinas Kesehatan juga ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing yang telah ditetapkan. Selain IKU dan IKK dalam bab ini juga ditambahkan tabel indikator.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi
2. Cascading Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi
3. Manajemen Risiko Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

1. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor .... Tahun 2025 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi membawahi :

a. Sekretariat;
b. Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas;
c. Bidang Penanggulangan Penyakit;
d. Bidang Kesehatan Lanjutan;
e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
g. Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, dan Kelompok Kerja adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

1) Tugas :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

2) Fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesekretariatan
b) Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan, pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum,keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
c) Pelaksanaan kebijakan terkait administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

d) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
e) Pelaporan dan rekomendasi terkait administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang berfungsi saling berkoordinasi:

1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Program;
b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang program;
c) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang program;
d) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
e) Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
f) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
g) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
h) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
c) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
d) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
e) Menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
f) Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
g) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
h) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
i) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
c) Menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
d) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
e) Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
f) Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
g) Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
h) Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
i) Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
j) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
k) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
l) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Jabatan Fungsional.

b. Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas

Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas terdiri 3 (tiga) Kelompok Kerja (Pokja), yaitu Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer, Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi, dan Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan.

1) Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Primer dan Komunitas.

2) Fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, dan kesehatan komunitas dan kelompok rentan.
b) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, dan kesehatan komunitas dan kelompok rentan;

c) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, dan kesehatan komunitas dan kelompok rentan;
d) Pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, dan kesehatan komunitas dan kelompok rentan;
e) Pelaporan dan rekomendasi di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, dan kesehatan komunitas dan kelompok rentan; dan
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas terdiri atas 3 (tiga) kelompok kerja yaitu:

1) Kelompok Kerja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer memiliki Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer yang meliputi tata kelola puskesmas; tata kelola integrasi pelayanan kesehatan primer; tata kelola klinis dan FKTP lainnya; tata kelola unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan; tata kelola laboratorium kesehatan masyarakat; tata kelola kesehatan tradisional; dukungan manajemen. Serta untuk Kegiatan Mutu Pelayanan Kesehatan meliputi sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer; sarana prasarana dan alat laboratorium kesehatan masyarakat; mutu puskesmas dan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan; mutu FKTP lainnya; mutu laboratorium kesehatan; mutu pelayanan kesehatan tradisional; dukungan manajemen. Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan rekomendasi di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer. Sedangkan untuk fungsinya yaitu :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;
c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;
d) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;
e) Penyiapan rekomendasi di bidang tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;
f) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi

Tugas Pokok Pokja Kesehatan Keluarga dan Gizi adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi. Sedangkan Fungsi nya yaitu :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
d) Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
e) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
f) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Kelompok Kerja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan

Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan memiliki kegiatan Kesehatan Komunitas meliputi strategi komunikasi informasi dan edukasi kesehatan; penggerakan masyarakat; pengelolaan posyandu bidang kesehatan; satuan pendidikan sehat; kesehatan kerja; kesehatan olahraga; partisipasi masyarakat; surveilans perilaku hidup sehat; dukungan manajemen. Serta untuk Kegiatan Kelompok Rentan meliputi promosi kesehatan jiwa dan kemitraan; deteksi dini dan pencegahan masalah kesehatan jiwa dan Napza; tata kelola gangguan jiwa; tata kelola gangguan penggunaan napza; eliminasi pasung; kesehatan penyandang disabilitas; pelayanan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; kesehatan lansia; dukungan manajemen. Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan komunitas, kelompok rentan, kesehatan jiwa dan NAPZA, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan pengembangan lainnya. Sedangkan fungsinya yaitu :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kesehatan komunitas, pelayanan kesehatan kelompok rentan, kesehatan jiwa dan NAPZA, kesehatan tradisional, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan komunitas, kelompok rentan, kesehatan jiwa dan NAPZA, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan pengembangan lainnya;
c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan komunitas, kelompok rentan, kesehatan jiwa dan NAPZA, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan pengembangan lainnya;
d) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan komunitas, kelompok rentan, kesehatan jiwa dan NAPZA, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan pengembangan lainnya;
e) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Penanggulangan Penyakit

Bidang Penanggulangan Penyakit berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Bidang Penanggulangan Penyakit terdiri 3 (tiga) Kelompok Kerja (Pokja), yaitu Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Pokja Surveilans dan Imunisasi, dan Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan.

1) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanggulangan Penyakit.

2) Fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyakit menular dan penyakit tidak menular, surveilans imunisasi, dan kejadian luar biasa, bencana dan kesehatan lingkungan;
b) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penyakit menular dan penyakit tidak menular, surveilans imunisasi, dan kejadian luar biasa, bencana dan kesehatan lingkungan;
c) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyakit menular dan penyakit tidak menular, surveilans imunisasi, dan kejadian luar biasa, bencana dan kesehatan lingkungan;
d) Pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang penyakit menular dan penyakit tidak menular, surveilans imunisasi, dan kejadian luar biasa, bencana dan kesehatan lingkungan;
e) Pelaporan dan rekomendasi di bidang penyakit menular dan penyakit tidak menular, surveilans imunisasi, dan kejadian luar biasa, bencana dan kesehatan lingkungan; dan

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penanggulangan Penyakit terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Kerja yaitu:

1) Kelompok Kerja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

Tugas Pokok Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sedangkan Outputnya yaitu :

a) Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Penemuan TB Sesuai Standar.
b) Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Keberhasilan Pengobatan TB Sesuai Standar.
c) Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS, Malaria, Filariasis, Kusta, Penyakit Dengue, Penyakit Hepatitis B yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar.
d) Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar.
e) Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Pengendalian Hipertensi sesuai standar.
f) Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Pengendalian DM sesuai standar.
g) Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan skrinning merokok pada anak sekolah (usia 10-21 th), Skrining Kanker Prioritas (paru, kolorektal, payudara), Skrining obesitas melalui pengukuran IMP atau LP (Lingkar Perut), Skrining Kolesterol pada 80% Puskesmas, Skrining IVA Minimal 10 % dari sasaran.
h) Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Pencegahan Penyakit Stroke (% kab/kota dengan capaian skrining stroke min 30%).

2) Kelompok Kerja Surveilans dan Imunisasi

Tugas Pokok Pokja Surveilans dan Imunisasi adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan penyakit, kegiatan surveilans dan imunisasi. Sedangkan Outputnya yaitu :

a) Tersedianya Dokumen Hasil Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap
b) Tersedianya Dokumen Hasil Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen Mencapai Target
c) Tersedianya dokumen respon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%

d) Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Surveilans dan Intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit
e) Tersedianya dokumen pelaksanaan surveilans kesehatan haji

3) Kelompok Kerja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan

Tugas Pokok Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan program penanggulangan penyakit, Kejadian Luar Biasa, Bencana, dan surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan. Sedangkan Outputnya yaitu :

a) Terlayaninya Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.
b) Tersedianya dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan.
c) Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan.
d) Tersedianya dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dalam penyelenggaraan pengawasan kualitas udara dan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat.
e) Tersedianya dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dalam pemantauan kualitas air minum dan tempat fasilitas umum (TFU) memenuhi syarat.
f) Tersedianya dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim bidang Kesehatan.
g) Terlaksananya fasilitasi penerapan pilar STBM di Kab/Kota.
h) Tersedianya dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan yaitu fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan.

d. Bidang Kesehatan Lanjutan

Bidang Kesehatan Lanjutan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Bidang Kesehatan Lanjutan terdiri 3 (tiga) Kelompok Kerja (Pokja), yaitu Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pokja Tata kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan.

1) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Lanjutan.

2) Fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, dan tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
b) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, dan tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
c) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, dan tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
d) Pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, dan tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
e) Pelaporan dan rekomendasi di bidang pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, dan tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan rujukan; dan
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Lanjutan, membawahi 3 (tiga) Kelompok Kerja antara lain:

1) Kelompok Kerja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tugas Pokok Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pelayanan kesehatan rujukan. Sedangkan Outputnya yaitu :

a) Tersedianya fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan" (RS PONEK).
b) Tersedianya fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan" (AMPSR).

2) Kelompok Kerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tugas Pokok Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan. Sedangkan Outputnya yaitu :

a) Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar (layanan prioritas).
b) Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar (ramah disabilitas).

c) Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar (Layanan KJSU).

3) Kelompok Kerja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tugas Pokok Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Tata kelola mutu pelayanan kesehatan rujukan. Sedangkan Outputnya yaitu :

a) Tersedianya *Public Safety Center* (PSC 119) yang Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
b) Terlaksananya Kegiatan yang diperlukan untuk dukungan Tim Kesehatan Provinsi.
c) Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya.
d) Tersedianya dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

e. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri 3 (tiga) Kelompok Kerja (Pokja), yaitu Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan, Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi.

1) Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Kesehatan.

2) Fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, dan pusat data dan teknologi informasi;
b) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, dan pusat data dan teknologi informasi.
c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, dan pusat data dan teknologi informasi;
d) Pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, dan pusat data dan teknologi informasi;

e) Pelaporan dan rekomendasi di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, dan pusat data dan teknologi informasi;
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Kerja antara lain:

1) Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tugas Pokok Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Sedangkan Outputnya yaitu :

a) Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).
b) Tersedianya dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2) Kelompok Kerja Farmasi dan Alat Kesehatan

Tugas Pokok Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan Outputnya yaitu :

a) Tersedianya dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan.
b) Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
c) Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (Faskes Lanjutan).
d) Terkendalinya PBF Cabang dan Cabang PAK yang diawasi dalam rangka penerbitan dan tindaklanjut penerbitan perizinan.

3) Kelompok Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi

Tugas Pokok Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi kesehatan. Sedangkan Outputnya yaitu :

a) Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.
b) Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa Tengah, struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian :

1) Subbagian Program;

2) Subbagian Keuangan; dan

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Rumah Sakit Daerah sebagai UOBK

d. Jabatan Fungsional

e. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, membawahi :

1) Kelompok Kerja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer;

2) Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi;

3) Kelompok Kerja Promosi, Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan.

f. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit , membawahi :

1) Kelompok Kerja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
2) Kelompok Kerja Surveilans dan Imunisasi;
3) Kelompok Kerja Kejadian Luar Biasa, Bencana, dan Kesehatan Lingkungan.

g. Kepala Bidang Kesehatan Lanjutan, membawahi :

1) Kelompok Kerja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan;

2) Kelompok Kerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

3) Kelompok Kerja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan;

h. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :

1) Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan;

2) Kelompok Kerja Farmasi dan Alat Kesehatan;

3) Kelompok Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor ... tahun 2025 sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2025

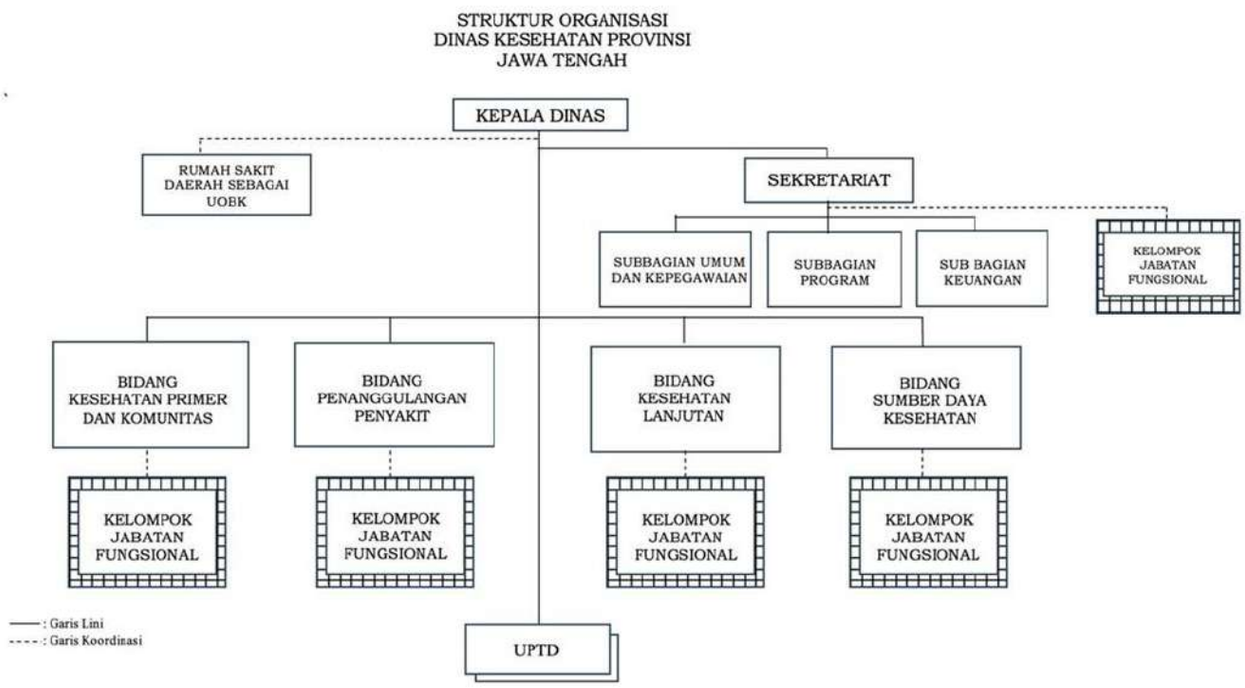

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memiliki Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan dan 6 (enam) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Kesehatan, serta berdasarkan pada Peraturan Pemerintah tahun 2019 pasal 21 maka 8 (delapan) Rumah Sakit Provinsi menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Organisasi dan tata kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 9 tahun 2025. Mendasarkan pada Bab II pasal 2, UPT Dinas terdiri atas:

1. Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A terdiri dari:
   a. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa;
   b. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang;
   c. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten; dan
   d. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati.
2. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
3. Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A.

Kedudukan Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A

Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A mempunyai tugas, melaksanakan tugas teknis operasional tertentu Dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A melaksanakan fungsi:

a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan, dan upaya kesehatan komunitas;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan, dan upaya kesehatan komunitas;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan, dan upaya kesehatan komunitas;
d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Balkesmas Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Balai;

   Melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

b. Subbagian Tata Usaha;

   Dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Kepala Subbagian TU mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas dimaksud meliputi:

   1) Menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
   2) Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
   3) Menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
   4) Menyiapkan pengelolaan keuangan;
   5) Menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
   6) Menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
   7) Menyiapkan kerjasama dan kehumasan;
   8) Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
   9) Menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
   10) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan;

   Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan normal, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan. Output tugas dari Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan meliputi:

1) Tersedianya obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan;
2) Tersedianya fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar
3) Tersedianya alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan;
4) Tersedianya alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar;
5) Tersedianya rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000;
6) Tersedianya fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan.

d. Pokja Upaya Kesehatan Komunitas;

Pokja Upaya Kesehatan Komunitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Pokja Upaya kesehatan komunitas. Output tugas dari Pokja Upaya Kesehatan Komunitas meliputi:

1) Terlaksananya kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
2) Terlaksananya kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit TB sesuai standar di Balkesmas wilayah Magelang.
3) Terlaksananya kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular.
4) Terlayaninya penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5) Terlaksananya kegiatan hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam

melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Gambar struktur organisasi Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagai berikut:

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A

Provinsi Jawa Tengah

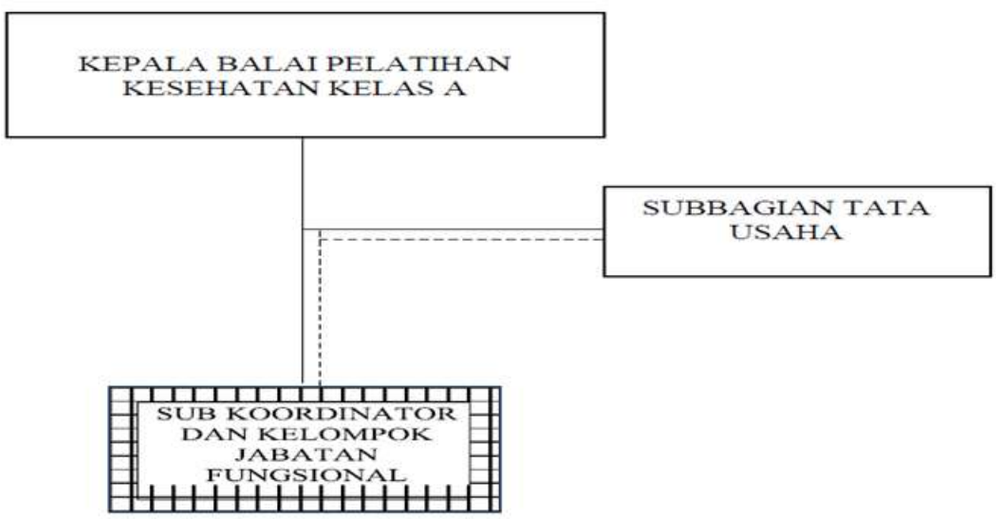

2.1.3 Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kelas A

Kedudukan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang laboratorium kesehatan masyarakat. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, melaksanakan tugas teknis operasional tertentu Dinas di bidang pelayanan pemeriksaan spesimen klinis dan pengujian sampel untuk

upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. serta peningkatan kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Balai Laboratorium Kesehatan Kelas A melaksanakan fungsi:

1) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang layanan mutu dan surveilans, dan pengujian alat kesehatan;
2) Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang layanan mutu dan surveilans, dan pengujian alat kesehatan;
3) Evaluasi dan pelaporan di bidang layanan mutu dan surveilans, dan pengujian alat kesehatan;
4) Pengelolaan ketatausahaan; dan
5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Balai

Kepala Balai melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kelas A.

b. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

1) Menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
2) Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
3) Menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
4) Menyiapkan pengelolaan keuangan;
5) Menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
6) Menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
7) Menyiapkan pengelolaan kerjasama dan kehumasan;
8) Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9) Menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
10) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin.

c. Pokja Pelayanan Mutu dan Surveilans;

Pokja Pelayanan Mutu dan Surveilans dipimpin oleh seorang Ketua Pokja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Pokja Pelayanan Mutu dan Surveilans mempunyai tugas melakukan

penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan Layanan, Mutu dan Surveilans. Output tugas Pokja Pelayanan Mutu dan Surveilans, meliputi:

1) Tersedianya fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun.
2) Tersedianya fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar.
3) Tersedianya alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional *maintenance center* yang disediakan dan dipelihara.
4) Tersedianya obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan.
5) Tersedianya obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan (PAK).

d. Pokja Pengujian Alat Kesehatan;

Pokja Pengujian Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Ketua Pokja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Pokja Pengujian Alat Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan Pengujian Alat kesehatan. Output Pokja Pengujian Alat Kesehatan, meliputi:

1) Tersedianya fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan

tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Gambar struktur organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagai berikut:

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kelas A

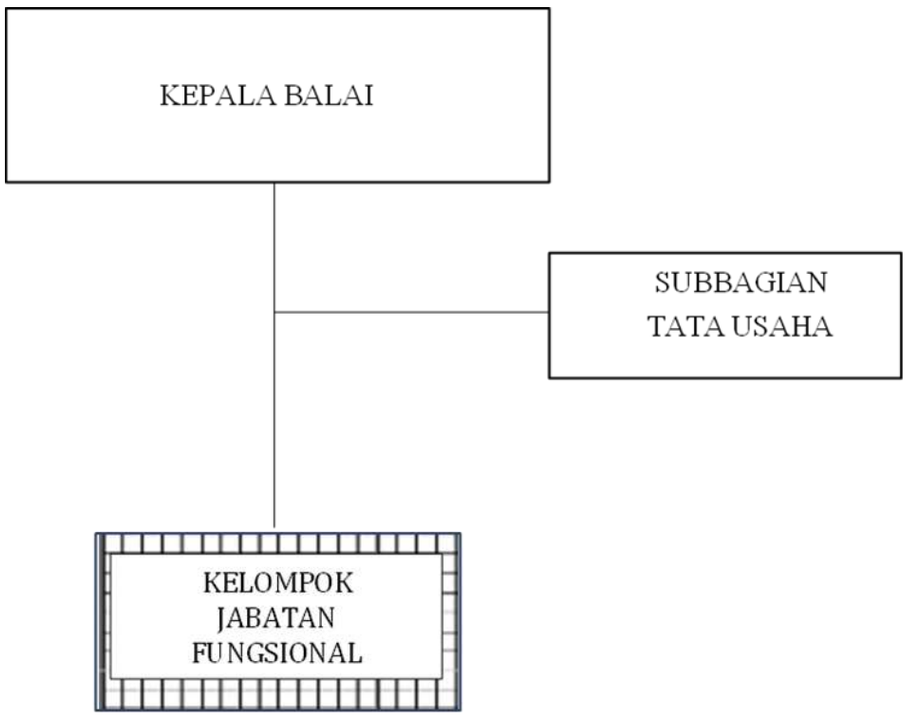

2.1.4 Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A

Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan pelatihan tenaga kesehatan.

Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyelenggaraan pelatihan dan bidang pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan.

Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A mempunyai tugas, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyelenggaraan pelatihan dan bidang pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A melaksanakan fungsi:

a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan;

b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan;
d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Balai;

Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelkes.

b. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

1) Menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
2) Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
3) Menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
4) Menyiapkan pengelolaan keuangan;
5) Menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
6) Menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
7) Menyiapkan kerjasama dan kehumasan;
8) Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9) Menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
10) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

c. Pokja Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan

Pokja Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan dipimpin oleh seorang Ketua Pokja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Pokja Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan mempunyai tugas Melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Peningkatan Mutu Pelatihan. Output Pokja Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan, meliputi:

1) Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan SDMK.

d. Pokja Penyelenggaraan Pelatihan

Pokja Penyelenggaraan Pelatihan dipimpin oleh seorang Ketua Pokja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Pokja Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyelenggaraan Pelatihan. Tugas dimaksud meliputi:

1) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDMK.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Gambar struktur organisasi Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A sebagai berikut:

Gambar 2.4

Struktur Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A

Provinsi Jawa Tengah

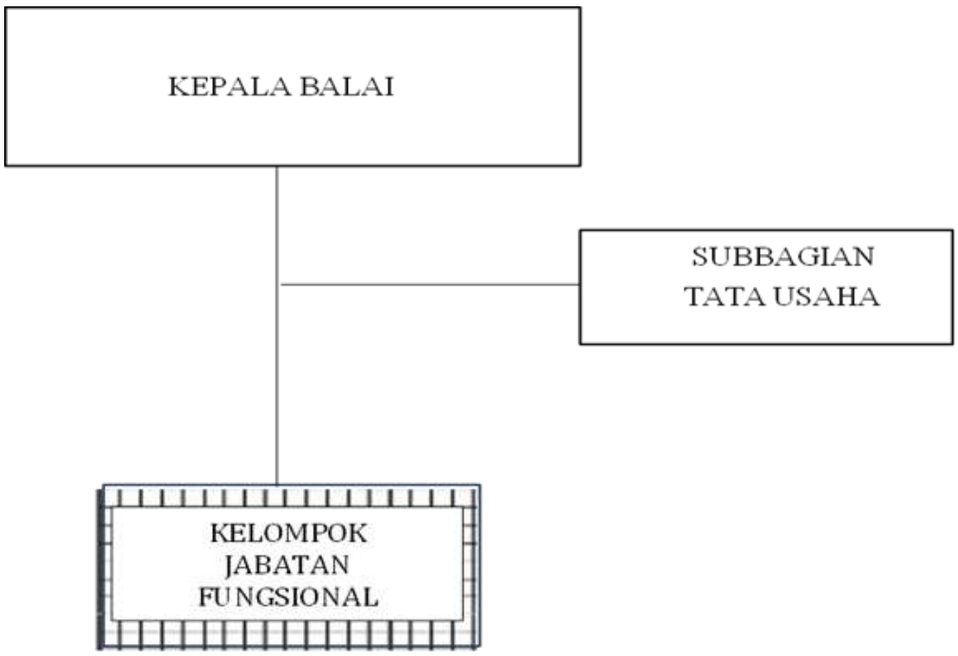

2.1.5 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi (RSDM) adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Kota Surakarta dan merupakan rumah sakit Kelas A (Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 71 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Kelas A). RSUD Dr. Moewardi juga menjadi rumah sakit pendidikan (*teaching hospital*) bagi calon dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I). Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi terletak di Jl. Kolonel Soetarto No. 132 Surakarta, dengan luas tanah sebesar 41.924 m^2 dan luas bangunan sebesar 56.542 m^2.

Dengan letak pada wilayah yang strategis, RSUD Dr. Moewardi sebagai rumah sakit rujukan mempunyai cakupan pasien yang cukup luas meliputi wilayah eks Karesidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur Bagian Barat. RSUD Dr. Moewardi sebagai Rumah Sakit Kelas A memiliki berbagai jenis pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medis dasar, spesialis, sub spesialis, keperawatan dan kebidanan serta pelayanan penunjang lainnya.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana RSUD dr. Moewardi memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

   RSUD dr. Moewardi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok, RSUD Dr. Moewardi mempunyai fungsi :
   a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD;
   b) Penyusunan program kerja dan anggaran RSUD;
   c) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
   d) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
   e) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
   f) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi Bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan Bidang Kesehatan;
   g) Penyelenggaraan kesekretariatan RSUD;
   h) Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSUD;
   i) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSUD; dan
   j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi RSUD dr. Moewardi, sebagaimana bagan berikut:

Gambar 2.5

Struktur Organisasi RSUD dr. Moewardi

Provinsi Jawa Tengah

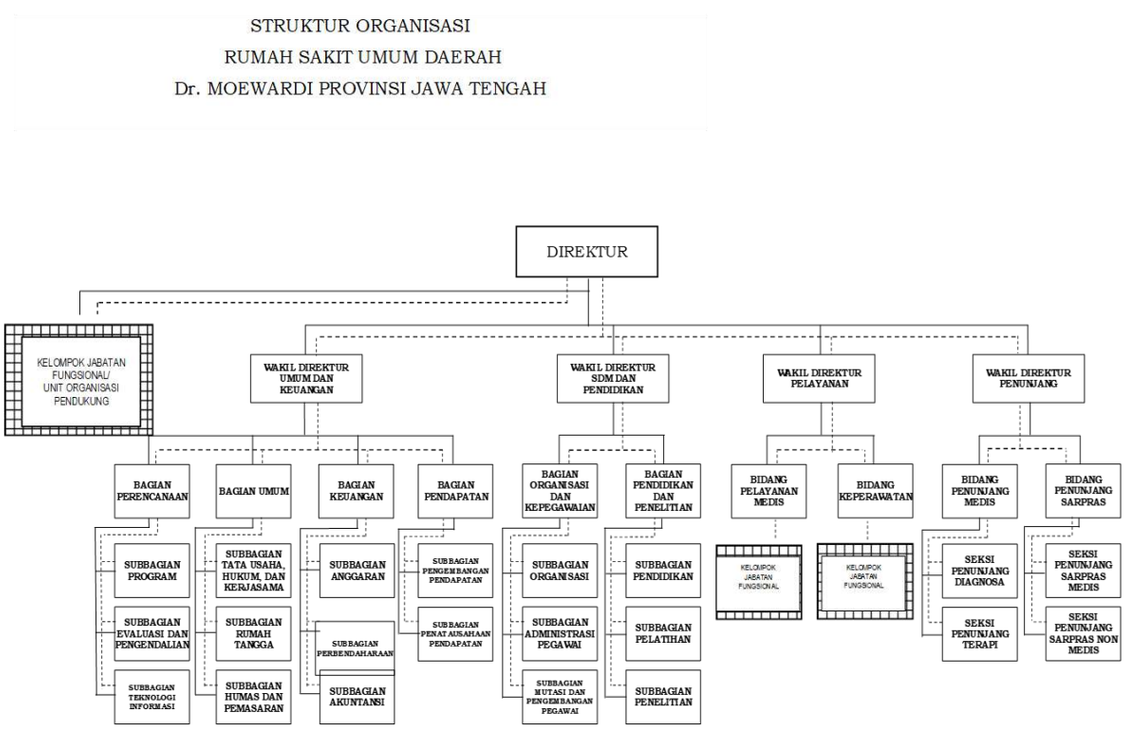

2.1.6 Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo

RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, merupakan UOBK yang dikelola berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana RSUD Prof Dr Margono Soekarjo memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

   RSUD Prof Dr Margono Soekarjo mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. Fungsi

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok, RSUD dr Margono Soekarjo mempunyai fungsi :

   a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD;
   b) Penyusunan program kerja dan anggaran RSUD;
   c) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
   d) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
   e) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
   f) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi Bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan Bidang Kesehatan;
   g) Penyelenggaraan kesekretariatan RSUD;
   h) Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSUD;
   i) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSUD; dan
   j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

   Struktur Organisasi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A, sebagaimana bagan berikut:

Gambar 2.6

Struktur Organisasi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo

Provinsi Jawa Tengah

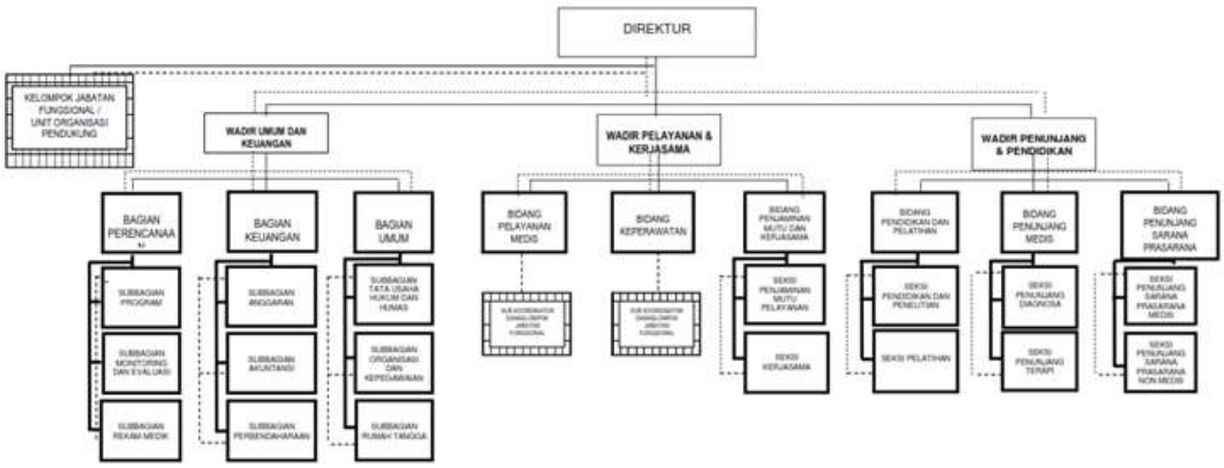

2.1.7 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, M.PH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada pasal 7 ayat 1 berbunyi "pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT Dinas Daerah Provinsi terdapat Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional". Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus, Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

RSUD dr. Adhyatma, MPH merupakan Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana RSUD dr. Adhyatma, MPH memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

   RSUD dr. Adhyatma, MPH mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. Fungsi

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok, RSUD dr. Adhyatma, MPH mempunyai fungsi :

   a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD;
   b) Penyusunan program kerja dan anggaran RSUD;
   c) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;

d) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
e) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
f) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi Bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan Bidang Kesehatan;
g) Penyelenggaraan kesekretariatan RSUD;
h) Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSUD;
i) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSUD; dan
j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi RSUD dr. Adhyatma, MPH berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B, sebagaimana bagan berikut:

Gambar 2.7

Struktur Organisasi RSUD dr. Adhyatma, MPH

Provinsi Jawa Tengah

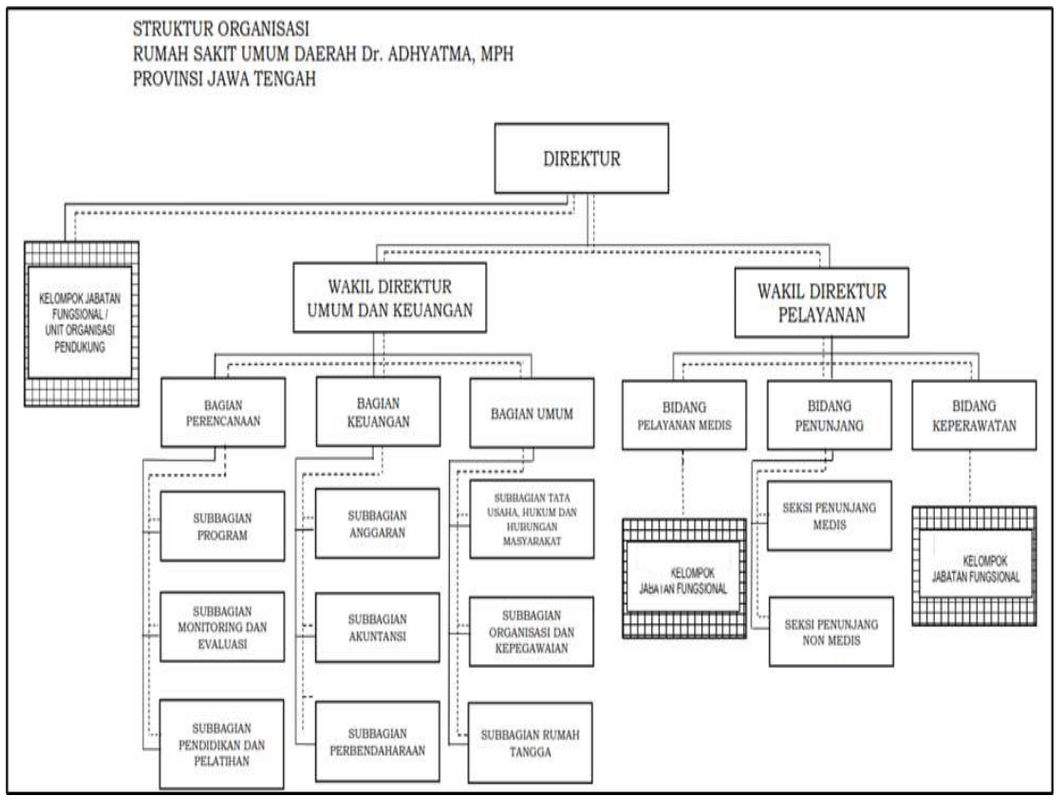

2.1.8 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta

RSUD dr. Rehatta berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ..... Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Kelas C.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana RSUD dr. Rehatta memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

   RSUD dr. Rehatta tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. Fungsi

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok, RSUD dr. Rehatta mempunyai fungsi :

   a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD;
   b) Penyusunan program kerja dan anggaran RSUD;
   c) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
   d) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;

e) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
f) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi Bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan Bidang Kesehatan;
g) Penyelenggaraan kesekretariatan RSUD;
h) Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSUD;
i) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSUD; dan
j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi RSUD dr. Rehatta berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Kelas C, sebagaimana bagan berikut:

Gambar 2.8

Struktur Organisasi RSUD dr. Rehatta

Provinsi Jawa Tengah

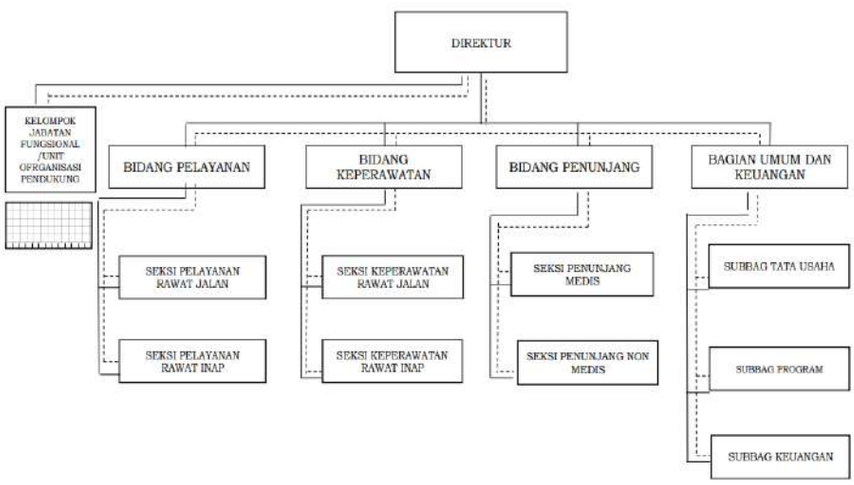

2.1.9 Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo

RSJD Dr. Amino Gondohutomo berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor ... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Kelas A.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana RSJD Dr. Amino Gondohutomo memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

RSJD Dr. Amino Gondohutomo memiliki tugas pokok, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan memberikan pelayanan utama di Bidang Penyakit Jiwa sesuai kekhususannya dan menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya, melalui upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, RSJD Dr. Amino Gondohutomo mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan RSJD;
b) Penyusunan Program Kerja dan Anggaran RSJD;
c) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSJD;
d) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
e) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
f) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat serta penapisan teknologi Bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan Bidang Kesehatan;
g) Penyelenggaraan kesekretariatan RSJD;
h) Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSJD;
i) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSJD; dan
j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor … Tahun 2025 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Kelas A sebagai berikut :

Gambar 2.9

Struktur Organisasi RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Provinsi Jawa Tengah

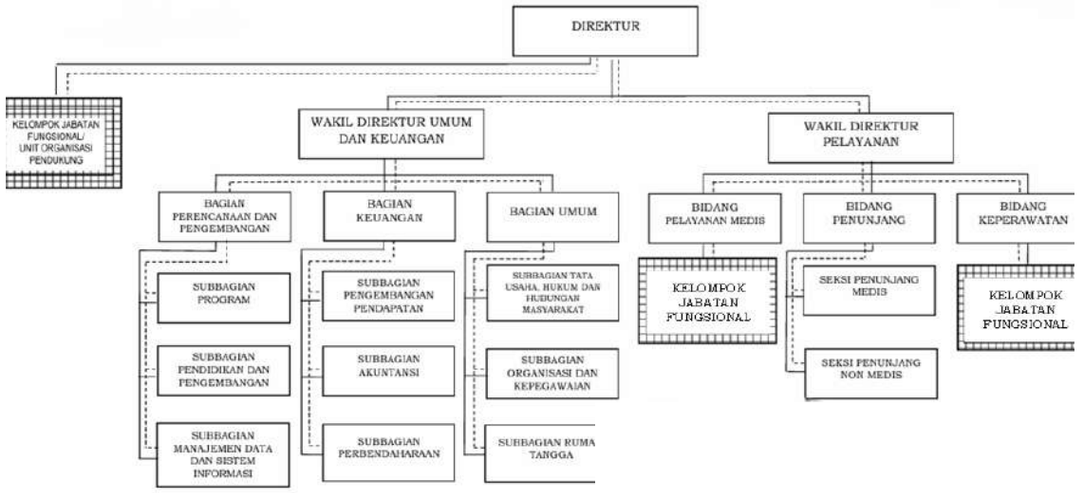

2.1.10 Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada pasal 7 ayat 1 berbunyi “pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT Dinas Daerah Provinsi terdapat Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional”. Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus, Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana RSJD dr. Arif Zainudin memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

   RSJD dr. Arif Zainudin memiliki tugas pokok, yaitu menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna dengan memberikan pelayanan utama di bidang penyakit jiwa sesuai kekhususannya dan menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya, melalui Upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian Masyarakat.

2. Fungsi

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok, RSJD dr. Arif Zainudin mempunyai fungsi :

   a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Kesehatan RSJD;
   b) Penyusunan program kerja dan anggaran RSJD;
   c) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSJD;

d) Pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
e) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan:
f) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pengabdian Masyarakat serta penapisan teknologi bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan:
g) Penyelenggaraan kesekretariatan RSJD;
h) Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSJD;
i) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSJD;
j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi RSJD dr. Arif Zainudin berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah kelas A, sebagaimana bagan berikut:

Gambar 2.10

Struktur Organisasi RSJD dr. Arif Zainudin

Provinsi Jawa Tengah

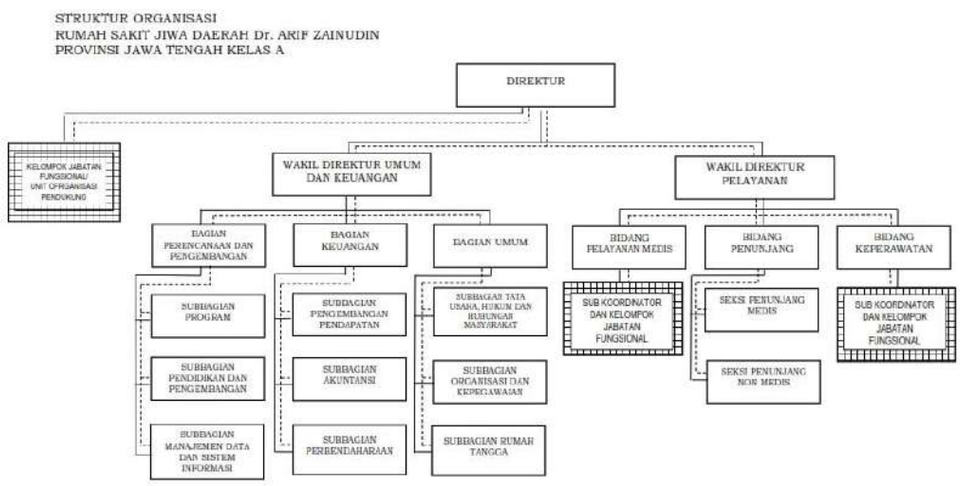

2.1.11 Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor .... Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Kelas A.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana RSJD dr. RM. Soedjarwadi memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

   RSJD dr. RM. Soedjarwadi memiliki tugas pokok, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan memberikan pelayanan utama di Bidang Penyakit Jiwa sesuai kekhususannya dan menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya melalui upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. Fungsi

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok, RSJD dr. RM. Soedjarwadi mempunyai fungsi :

   a) perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan RSJD;
   b) penyusunan program kerja dan anggaran RSJD;
   c) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSJD;
   d) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
   e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
   f) penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat serta penapisan teknologi Bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan Bidang Kesehatan;
   g) penyelenggaraan kesekretariatan RSJD;
   h) pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSJD;
   i) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSJD; dan
   j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi

   Struktur Organisasi RSJD dr. RM. Soedjarwadi berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah kelas A, sebagaimana bagan berikut:

Gambar 2.11

Struktur Organisasi RSJD dr. RM. Soedjarwadi

Provinsi Jawa Tengah

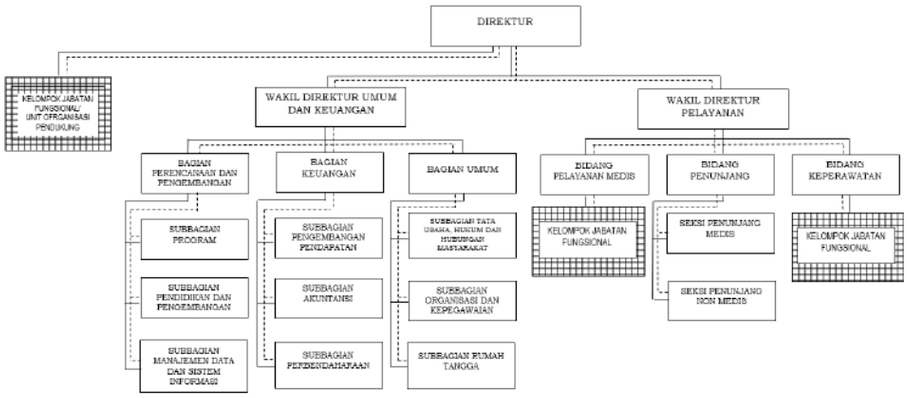

2.1.12 Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

   Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan mata dengan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat

2. Fungsi

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam mempunyai fungsi :

   a) perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Mata;
   b) penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Mata;
   c) pelayanan medis kesehatan mata;
   d) pelayanan keperawatan;
   e) pelayanan penunjang medis dan non medis;
   f) pelayanan rujukan;
   g) pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya kesehatan mata;

h) penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
i) pelaksanaan kemitraan;
j) pengelolaan kesekretariatan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah; dan
k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah 10 Tahun 2025 tentang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B, sebagaimana bagan berikut:

Gambar 2.12

Struktur Organisasi RSMD Soepardjo Roestam

Provinsi Jawa Tengah

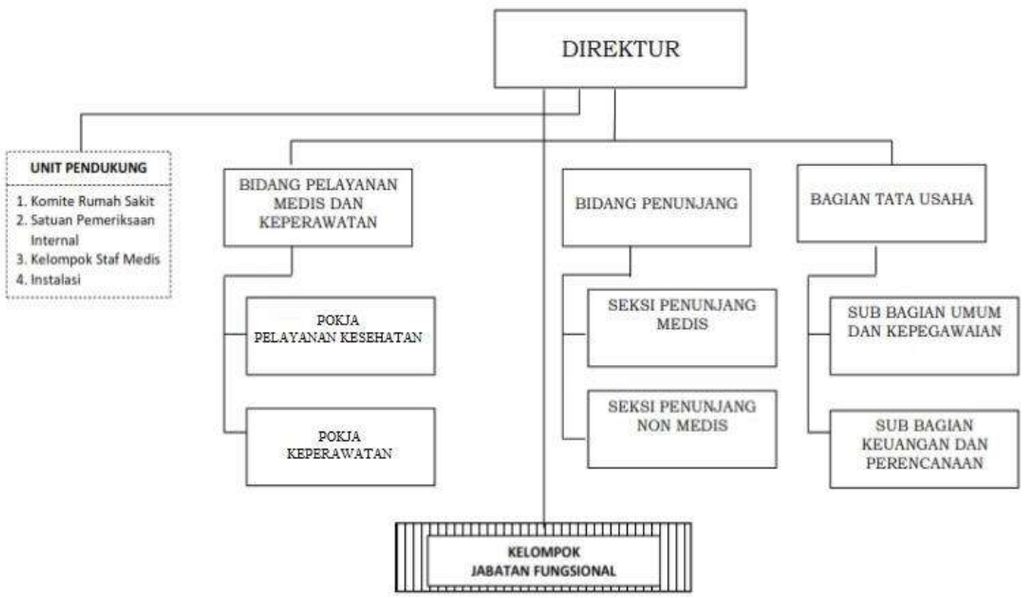

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

2.2.1 Sumber Daya Manusia

2.2.1.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan dan UPT

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas terdapat 6 UPT Dinas. UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. UPT Dinas Kesehatan yaitu:

1. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
2. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
3. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
4. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
5. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat
6. Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja . Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi sebagai berikut :

1. Data Kepegawaian :

   Jumlah tenaga aktif di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPTD sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 542 orang. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan di lingkup Dinas Kesehatan dan UPT tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	INSTITUSI	Jabatan			Jumlah tenaga Aktif
		Struktura 1	Fungsional	Pelaksana	
1	Dinkes Prov. Jateng	9	87	83	179
2	Balkesmas Magelang	2	38	9	49
3	Balkesmas Pati	2	41	6	49
4	Balkesmas Klaten	0	45	5	50
5	Balkesmas Ambarawa	2	34	6	42
6	Balai Labkes & PAK Semarang	1	47	13	61
7	Bapelkes	1	6	18	25
	JUMLAH	19	394	155	568

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Jumlah tenaga aktif yang menjabat sebagai pejabat struktural sebanyak 19 orang, pejabat fungsional 394 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 155 orang. Banyaknya tenaga fungsional di Dinas Kesehatan dan UPT karena adanya kesempatan menjadi pejabat fungsional.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	INSTITUSI	TINGKAT PENDIDIKAN											
		S3	S2	S1	D4	D3	Sar Mud	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JML
1	Dinkes Prov. Jateng	1	74	72	1	10	1	0	0	15	5	0	179
2	Balkesmas Magelang	0	9	10	1	19	0	0	0	8	1	1	49
3	Balkesmas Pati	0	4	17	5	16	1	0	0	5	0	1	49
4	Balkesmas Klaten	0	8	10	0	28	1	0	0	3	0	0	50
5	Balkesmas Ambarawa	0	6	12	2	18	0	0	0	2	2	0	42
6	Balai Labkes & PAK Semarang	0	8	13	3	32	0	0	0	4	1	0	61
7	Bapelkes	1	5	7	0	3	0	0	0	8	1	0	25
	JUMLAH	2	131	177	17	173	3	0	0	52	11	2	568

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT yang telah lulus menempuh pendidikan S3 sebanyak 2 orang, lulusan S2 sebanyak 131, lulusan S1 sebanyak 177 orang, D4 sebanyak 17 orang, Diploma 3 sebanyak 173 orang, Sarjana Muda 3 orang, SLTA sebanyak 52 orang, dan SLTP sebanyak 11 orang. Adanya pegawai Dinkes yang melanjutkan studi jenjang S-3 dan S-2 karena adanya kesempatan dari BKD provinsi dengan sumber dana dari APBD Provinsi dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai.

2.2.1.2 Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lingkungan
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	INSTITUSI	Jabatan			Jumlah tenaga Aktif
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	RSUD dr. Moewardi	28	1836	473	2337
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	29	1563	270	1889
3	RSUD dr. Adhyatma, M.PH	20	892	284	1196
4	RSUD dr. Rehatta	12	407	128	547
5	RSJD dr. Amino Gondohutomo	17	435	128	580
6	RSJD dr. Arif Zainudin	19	427	122	568
7	RSJD dr.RM. Soedjarwadi	18	371	95	484
8	RSMD Soepardjo Roestam	10	84	28	122
	JUMLAH				

Berdasarkan tabel diatas Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi pada tahun 2024 sebanyak 2.337 orang, Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo sebanyak 1.889 orang, Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, M.PH sebanyak 1.196 orang, Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta sebanyak 547 orang, Sumber Daya Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo sebanyak 580 orang, Sumber Daya Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin sebanyak 568 orang, Sumber Daya Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi sebanyak 484 orang, Sumber Daya Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam sebanyak 122 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	INSTITUSI	TINGKAT PENDIDIKAN												
		Dr Spesialis	Dr. Umum	S2/S3	S1	D4	D3	Sar mud	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JML
1	RSUD dr. Moewardi	223	16	270	693	65	986	0	0	0	321	2	0	2337
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	110	32	31	397	45	895	0	0	0	292	66	12	1889
3	RSUD dr. Adhyatma, M.PH	78	33	49	350	47	457	0	0	3	162	14	3	1196
4	RSUD dr. Rehatta	24	20	15	110	5	272	0	0	0	92	6	3	547
5	RSJD dr. Amino Gondohutomo	25	15	24	183	14	251	0	0	0	63	3	2	580
6	RSJD dr. Arif zaenudin	18	15	32	210	17	223	0	0	0	53	0	0	568
7	RSJD dr.RM. Soedjarwadi	26	17	10	137	22	232	0	0	0	40	0	0	484
8	RSMD Soepardjo Roestam	9	12	7	22	10	51	0	0	0	10	1	0	122
	JUMLAH													

Berdasarkan tabel diatas Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 dengan jumlah Dr. Spesialis paling banyak yaitu di RSUD dr. Moewardi sebanyak 223 orang, dan Dr. Spesialis paling sedikit di RSJD dr. Arif Zainudin sebanyak 18 orang. Hal tersebut sudah sesuai dengan fasilitas dan kemampuan pelayanan medis berdasarkan klasifikasi nya.

2.2.2 Data Fasilitas Perlengkapan

2.2.2.1 Data Fasilitas Perlengkepan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa tanah, gedung, serta berbagai peralatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT Tahun 2024

NO	KETERANGAN	DINKES DAN UPT (saldo akhir)	
		Jumlah	Harga
1	TANAH	24	61.099.740.000
2	ALAT BESAR	34	4.832.016.825
3	ALAT ANGKUTAN	119	32.434.889.918
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	98	3.021.535.934
5	ALAT PERTANIAN	1	11.600.000
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	8.701	43.608.318.710
7	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	798	5.451.404.213
8	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	2.763	104.803.041.213
9	ALAT LABORATORIUM	645	53.561.173.206
10	ALAT PERSENJATAAN	-	-
11	ALAT KOMPUTER	1.652	15.544.857.292
12	ALAT EKSPLORASI	1	1.800.000
13	ALAT PENGEBORAN	-	-
14	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-
15	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
16	ALAT KESELAMATAN KERJA	8	153.375.000
17	ALAT PERAGA	3	59.534.300
18	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	10	22.500.000
19	RAMBU RAMBU	-	-
20	PERALATAN OLAHRAGA	16	90.239.200
21	BANGUNAN GEDUNG	83	136.995.392.791
22	MONUMEN	2	144.162.000
23	BANGUNAN MENARA	-	-
24	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	4.933.166.740
25	JALAN DAN JEMBATAN	1	57.825.000
26	BANGUNAN AIR	9	835.756.500

NO	KETERANGAN	DINKES DAN UPT (saldo akhir)	
		Jumlah	Harga
27	INSTALASI	26	3.558.144.564
28	JARINGAN	15	808.726.228
29	BAHAN PERPUSTAKAAN	1.157	232.446.464
30	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	102	105.951.000
31	HEWAN	2	7.000.000
32	BIOTA PERAIRAN	-	-
33	TANAMAN	1	34.650.000
34	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
35	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
36	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	5	1.148.700.220
JUMLAH TOTAL		**16.280**	**473.557.947.318**

Aset Dinas Kesehatan dan UPT pada tahun 2024 sebanyak 36 jenis dengan jumlah Saldo akhir sebesar Rp.473.557.947,318,00 mengalami penyusutan dibanding aset tahun 2023 sejumlah Rp.492.459.821,00. Penyusutan terjadi karena pengurangan nilai aset dan pengurangan pengadaan belanja modal.

Penyelenggaran sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di Jawa Tengah terdiri dari 881 puskesmas (508 puskesmas non rawat inap dan 375 puskesmas rawat inap), 13 balai kesehatan, 194 laboratorium kesehatan (34 daerah milik pemerintah dan 160 milik swasta) dan 361 RS dengan 347 RS telah terakreditasi (305 Paripurna, 20 Utama dan 3 Madya). Dukungan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan berupa sarana produksi/industri: penyalur alat Kesehatan 90, perbekalan Kesehatan rumah tangga 92, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 115, Kosmetika 50, industri farmasi 21, produksi alat Kesehatan 109, dan industri obat tradisional/ekstrak bahan alami (IOT/EBA) 17/7. Sarana penyalur berupa: Cabang Penyalur Alkes 88, cabang pedagang besar farmasi 143, apotik 4.013, toko obat 381 dan toko alat Kesehatan 82.

2.2.2.2 Data Fasilitas Perlengkapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa tanah, gedung, serta berbagai peralatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	KETERANGAN	RSUD dr. MOEWARDI		RSUD Prof. Dr. MARGONO		RSUD dr. ADHYATMA		RSUD dr. REHATTA	
		Jml.	Harga	Jml.	Harga	Jml.	Harga	Jml.	Harga
1	TANAH	11	112.170.318.000	14	104.730.000.000	9	45,948,850,675	2	653.830.890.470
2	ALAT BESAR	51	18.999.051.070	66	21.208.346.104	36	15,999,450,466	11	3.358.243.889
3	ALAT ANGKUTAN	48	11.536.743.191	80	12.868.590.363	37	6,973,990,990	45	7.557.057.344
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	57	1.715.005.638	276	4.081.951.191	282	680,226,269	67	613.544.725
5	ALAT PERTANIAN			12	43.982.500	13	384,992,795	19	126.640.630
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	9504	66.872.460.843	11.648	84.000.738.869	7,478	48,793,879,702	3.969	20.506.846.124
7	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	449	4.957.930.523	166	8.196.290.736	1,063	4,563,138,686	219	1.632.652.239
8	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	10.567	1.024.799.808.175	10.253	734.286.032.530	6,288	379,792,173,918	3.856	149.710.909.042
9	ALAT LABORATORIUM	297	70.515.573.709	102	66.731.271.858	491	22,519,720,430	61	2.631.440.578
10	ALAT PERSENJATAAN			-	-	-	-	3	187.829.055
11	ALAT KOMPUTER	3.225	37.164.338.062	2.802	49.758.705.046	1,759	18,498,987,714	371	3.538.305.577
12	ALAT EKSPLORASI			-	-	-	-		
13	ALAT PENGEBORAN			-	-	-	-		
14	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN			-	-	-	-		
15	ALAT BANTU EKSPLORASI			-	-	-	-		
16	ALAT KESELAMATAN KERJA			-	-	-	-		
17	ALAT PERAGA	9	1.335.877.692	21	390.625.882	-	-	1	12.150.000

NO	KETERANGAN	RSUD dr. MOEWARDI		RSUD Prof. Dr. MARGONO		RSUD dr. ADHYATMA		RSUD dr. REHATTA	
		Jml.	Harga	Jml.	Harga	Jml.	Harga	Jml.	Harga
18	PERALATAN PROSES/PRODUKSI			1	95.000.000	6	67,314,000		
19	RAMBU RAMBU			-	-	-	-	15	20.682.300
20	PERALATAN OLAH RAGA	4	25.800.000	2	20.079.600	4	21,475,000	43	232.223.649
21	BANGUNAN GEDUNG	42	572.769.544.782	28	369.681.090.967	36	168,294,042,604	186	87.286.472.035
22	MONUMEN			-	-	-	-	2	223.611.000
23	BANGUNAN MENARA			-	-	-	-		
24	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	442.159.000	1	508.200.000	4	1,300,955,769	13	4.467.220.000
25	JALAN DAN JEMBATAN	1	952.451.000	-	-	1	49,950,000	18	4.212.346.875
26	BANGUNAN AIR	7	2.821.073.315	1	175.000.000	14	1,013,070,158	24	3.626.015.250
27	INSTALASI	9	9.101.978.739	5	376.921.875	26	18,651,259,120	27	4.000.724.214
28	JARINGAN	2	447.980.000	8	4.120.527.975	-	-	6	3.109.059.219
29	BAHAN PERPUSTAKAAN	5.969	493.363.865	1.373	195.908.140	902	342,927,581	3.995	337.390.600
30	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	6	33.525.000	8	68.612.500	9	55,000,000	52	501.733.666
31	HEWAN			-	-	-	-		
32	BIOTA PERAIRAN			-	-	-	-		
33	TANAMAN			-	-	5	295,101,633		
34	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA			-	-	-	-		
35	ASET TETAP DALAM RENOVASI			-	-	-	-		
36	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	2	198.473.357.041	-	-	-	-	1	47.882.390.643
JUMLAH TOTAL		**30.261**	**2.135.628.339.645**	**26.867**	**1.461.537.876.136**	**18,463**	**734,246,507,510**	**13.006**	**999.606.379.124**

.

Aset Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebanyak 36 jenis dengan jumlah Saldo akhir di masing-masing Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu RSUD dr. Moewardi sebanyak Rp. 2.135.628.339.645,00; RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebanyak Rp. 1.461.537.876.136,00; RSUD dr. Adhyatma, M.PH sebanyak Rp. 734,246,507,510,00; RSUD dr. Rehatta sebanyak Rp. 999.606.379.124,00.

2.2.2.3 Data Fasilitas Perlengkepan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa tanah, gedung, serta berbagai peralatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	KETERANGAN	RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO		RSJD DR ARIF ZAINUDIN		RSJD DR SOEDJARWADI	
		Jml.	Harga	Jml.	Harga	Jml.	Harga
1	TANAH	2	90.572.000.000	4	50.269.000.000	4	14.192.500.000
2	ALAT BESAR	18	6.682.524.900	11	5.355.770.861		-
3	ALAT ANGKUTAN	107	6.012.757.660	92	7.450.890.470	47	5.602.981.742
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	23	50.130.592	33	832.583.990	37	44.472.155.341
5	ALAT PERTANIAN	1	14.996.100	2	11.317.500	-	-
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.294	18.189.938.743	5816	36.703.617.995	4596	23.397.834.596
7	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	135	817.445.446	180	1.597.984.909	118	740.019.353
8	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	1.967	86.088.314.366	996	62.345.943.426	1405	79.493.791.881
9	ALAT LABORATORIUM	115	2.910.072.827	52	2.203.079.252	64	3.199.145.251
10	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-
11	ALAT KOMPUTER	631	4.263.230.543,00	685	5.998.155.141	625	4.629.050.541
12	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-
13	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-
14	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-
15	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-
16	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	2	51.326.000	96	111.420.422.266
17	ALAT PERAGA	4	26.664.000	4	41.200.000	16	311.938.000

NO	KETERANGAN	RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO		RSJD DR ARIF ZAINUDIN		RSJD DR SOEDJARWADI	
		Jml.	Harga	Jml.	Harga	Jml.	Harga
18	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-
19	RAMBU RAMBU	-	-	1	9.500.000	-	-
20	PERALATAN OLAH RAGA	1	86.900.000	8	47.575.000	-	-
21	BANGUNAN GEDUNG	58	102.098.983.688	79	110.059.159.684	39	71.828.084.650
22	MONUMEN	-	-	1	814.052.600	-	-
23	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-
24	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	175.858.000	1	491.070.000	7	1.955.705.081
25	JALAN DAN JEMBATAN	5	2.895.101.000	1	3.416.771.073	2	119.263.000
26	BANGUNAN AIR	1	98.529.000	2	100.621.000	6	1.158.273.500
27	INSTALASI	8	2.819.860.000	11	6.718.206.791	7	8.413.141.599
28	JARINGAN	8	1.567.161.390	-	-	1	256.173.000
29	BAHAN PERPUSTAKAAN	300	38.858.950	1266	79.570.793	1680	74.995.830
30	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBU DAYAAN/OLAH RAGA	5	418.240.750	194	41.085.000	15	72.150.000
31	HEWAN	-	-	-	-	-	-
32	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-
33	TANAMAN	-	-	-	-	-	-
34	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-
35	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-
36	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		**6.684**	**325.827.567.955**	**9.441**	**294.638.481.485**	**8.765**	**371.337.625.631**

Aset Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebanyak 36 jenis dengan jumlah Saldo akhir di masing-masing Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu RSJD Dr. Amino Gondhohutomo sebanyak Rp. 325.827.567.955,00; RSJD dr. Arif Zainudin sebanyak Rp. 294.638.481.485,00; RSJD dr. RM. Soedjarwadi sebanyak Rp. 371.337.625.631,00.

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.3.1 Kinerja Umum

2.3.1.2 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum kinerja Dinas Kesehatan berkaitan dengan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit, kesehatan lingkungan, sumber daya manusia kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, farmasi dan perbekalan kesehatan, manajemen informasi dan pengembangan kesehatan serta regulasi kesehatan termasuk pelaksanaan kesekretariatan dinas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Layanan administrasi Sekretariat meliputi layanan kehumasan, penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, pengelolaan administrasi keuangan dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh aparat pengawas instansi pemerintah.

Jumlah dokumen buku informasi kesehatan yang dihasilkan pada tahun 2024 sebanyak 12 dokumen yaitu dokumen Buku Saku Kesehatan tahun 2024, dokumen Buku Saku Kesehatan TW1, TW2, TW3 tahun 2024, dokumen Buku Pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dan Semester 1 tahun 2024, Dokumen Buku Profil Kesehatan tahun 2024, dokumen Buku Saku kinerja kesehatan tahun 2024 dan semester 1 tahun 2024, dokumen Buku Data Dasar Puskesmas dan Rumah sakit tahun 2024, dokumen buku data dasar FKTP tahun 2024 serta dokumen hasil kajian bidang kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 485.1/2562/2022 tentang Standar Pelayanan Publik, jenis layanan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Penilaian Kesesuaian/ Verifikasi Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan;
2. Penilaian Kesesuaian/ Verifikasi Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang;
3. Penilaian Kesesuaian/ Verifikasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional;
4. Pelayanan Permohonan Informasi dan Data;
5. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
6. Pelayanan Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK);
7. Pelayanan Mahasiswa Magang/ Penelitian;
8. Pelayanan Rekomendasi Registrasi Puskesmas;
9. Pelayanan Penerbitan STRTTK;
10. Penilaian Kesesuaian Izin Berusaha Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Laboratorium Medis Pratama);
11. Verifikasi Usulan sebagai Laboratorium PCR Covid-19;
12. Persetujuan Izin Berusaha Aktifitas RS Pemerintah dan Swasta Kelas B;
13. Persetujuan Izin Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama dan RS;

14. Pertimbangan Persetujuan Pendirian Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Utama.

Pelayanan kegiatan kehumasan meliputi berbagai macam kegiatan. Hal-hal penting yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia kehumasan dan layanan informasi antara lain adalah bagaimana mereka dapat memberikan citra atau image yang baik terkait dengan instansinya, menginformasikan data yang akurat dan mudah dimengerti, mengembangkan kreatifitas dalam menyajikan informasi dan menguasai perkembangan teknologi informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik, dapat melaksanakan layanan publik kepada masyarakat secara cepat, mudah, dan murah serta sederhana. Hasil kegiatan PPID Pelaksana ini berupa Informasi Kedinasan (baik yang dipublikasi dan dikecualikan) yang dapat diminta oleh masyarakat (guna kepentingan masyarakat) baik secara langsung (datang ke kantor) atau melalui website PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (www.dinkesjatengprov.go.id/PPID).

Kegiatan peliputan dan penayangan bertujuan untuk memperoleh berita yang akan diolah menjadi bahan publikasi ke media serta membangun citra instansi. Hasil kegiatan ini berupa rilis berita dan tayangan liputan (baik gambar/video yang akan di unggah di media sosial akun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (*website, Instagram, twitter, youtube*). Kegiatan pers conference bertujuan untuk menyampaikan/ meluruskan berita kesehatan yang sedang trending di suatu waktu tertentu. Hasil kegiatan tersebut berupa rilis berita yang tayang di beberapa media (cetak/non cetak).

Kegiatan pelayanan publik dari segi publikasi kegiatan OPD dan aduan masyarakat. Tujuan kegiatan ini menyebarluaskan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sehingga menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat, *stakeholders*/pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan humas pemerintah. Kegiatan tersebut berupa penyebarluasan berita kegiatan Instansi melalui akun media sosial (Instagram : @dinkesjateng_prov, Facebook : DINKES JATENG, Twitter : @dinkesjateng, dan Youtube : Dinkesprov Jateng). Hasil kegiatan ini berupa Editing Konten Gambar untuk unggahan/*upload*: > 30 gambar perbulan, dan editing konten video untuk unggahan/*upload*: minimal 2 video perbulan. Untuk pengelolaan pengaduan dapat melalui Twitter, Instagram, Lapor Gub (total jumlah dari admin Lapor Gub pusat) dan aduan manual.

Kegiatan pelayanan di gudang terdiri dari persediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan cetakan yang berada di gudang tambak aji. Insektisida, alat

kesehatan dan obat program berada di gudang Salatiga, sedangkan untuk ATK di lantai 4 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Persediaan barang-barang tersebut bersumber dari anggaran APBD, APBN, dropping APBN dan sumber lainnya (GF dan WHO). Data dukung kegiatan pelayanan tersebut antara lain : buku penerimaan, surat perintah mengeluarkan barang, surat bukti barang keluar (SBBK), buku pengeluaran, kartu persediaan, stock opname, data obat expired, data pemusnahan obat, berita acara serah terima (BAST), dan surat alokasi. Kegiatan pelayanan pengelolaan persediaan obat di gudang sifatnya hanya menyimpan, mendistribusikan sesuai alokasi atau SPMB dan melaporkan. Obat yang ada di gudang di distribusikan ke 35 Kabupaten/Kota.

Layanan umum lainnya adalah respon cepat penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Bencana dalam waktu <24 jam, respon cepat penanganan KLB Penyakit dalam waktu <24 jam. Pelayanan perizinan bidang farmasi <22 hari kerja meliputi: rekomendasi industri farmasi paling lama 30 hari kerja, rekomendasi Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) paling lama 30 hari kerja, izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) paling lama 14 hari kerja, Rekomendasi ijin produk kosmetik paling lama 21 hari kerja, Rekomendasi sertifikasi produk alat kesehatan dan rekomendasi sertifikasi produk PKRT paling lama 30 hari kerja, Rekomendasi izin PAK dan izin cabang PAK paling lama 30 hari kerja, rekomendasi izin PBF cabang paling lama 18 hari kerja. Batas waktu tersebut berlaku apabila berkas telah diterima secara lengkap. Pelayanan bukti lapor tenaga kesehatan, lolos butuh, surat penugasan spesialis dan STRTTK maksimal 30 hari kerja sejak berkas lengkap diterima. Tanggapan atas pengaduan akan dilayani kurang dari 2 x 24 jam.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dan

Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 – 2024

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		TUJUAN				**TUJUAN**																				
		Angka Harapan Hidup (AHH)				**Angka Harapan Hidup (AHH)**	Angka						74,59	74,72	74,6	74,39	74,49	74,58	74,69	74,91					
		SASARAN				**SASARAN**																				
		Angka Kematian Ibu				Angka Kematian Ibu	100.000/KH				85,5	84	82,5	81		98,6	199	84,6	76,15	74,64	86,71	42,21	97,52	106,37	
		Angka Kematian Balita				Angka Kematian Bayi	1.000/KH				8,1	8	7,9	7,8		8,99	8,95	8,2	9,28	8,57	90,10	89,39	96,34	84,05	
		Angka Kematian Bayi				Angka Kematian Balita	1.000/KH				10,45	10,45	10,45	10,43		7,79	7,87	7,02	8,02	7,57	134,15	132,78	148,86	130,05	
		Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi				Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	%				0,23	0,26	0,29	0,32	0	0,23	0,26	0,29	0,32	0	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%				51	57	63	66	66,6	57	57	62,19	69,47	66,6	111,76	100,00	98,71	105,26	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		dan rujukan sesuai ketentuan																							
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa				Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%				52	54	57	60	63,9	65,5	65,5	50	91,71	65,71	125,96	121,30	87,72	152,85	
		Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular				Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%				57	62	67	72	63,69	84,29	84,12	73,57	92,14	65,71	147,88	135,68	109,81	127,97	
		Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi				Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi	%				81	82	83	84	87	81,43	92,65	85,82	88,97	88,24	100,53	112,99	103,40	101.42	
		Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo				Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%				87,61	87,63	87,65	87,67		89,6	89,82	89,87			102,27	102,50	102,53	0,00	
		Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo				Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo	%				85	85	90	90	90	85,55	87,78	90	91,11	91,11	100,65	103,27	100,00	101,23	100

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD dr. Rehatta				Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD dr. Rehatta	%				80	85	90	95		82,3	86,73	84,07	88,49		102,88	102,04	93,41	93,15	
		Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo				Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo					100	100	100	100	98	99,31	99,23	99,88	98,75	98,75	99,31	99,23	99,88	98,75	100,77
		Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta				Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta					98,1	98,12	98,15	98,17		92,07	96,6	98,34			93,85	98,45	100,19	0,00	
		Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi				Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi					85	90	95	100	100	92,03	92,65	98,35	98	98,88	108,27	102,94	103,53	98,00	98,88
		PROGRAM																							
		Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita	%	68,57	60,00								68,57	60,00				51,42	60,00				74,99	100,00	
		Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi	%	62,86	60								62,86	60				48,57	60				77,27	100,00	
		Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu	%	22,86	40								22,86	40				51,42	40				224,93	100,00	
						Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%				62,86	68,57	74,26	80	34,28	62,86	17,14		80		100,00	25,00	0,00	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Kab/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga baik	%	85,00	94	Persentase Kab/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga baik	%				57	71	85,00	100,00		57	71	77	100,00		100,00	100,00	90,59	100,00	
		Persentase kab/kota dengan peningkatan kinerja program PM	%	60,00	68,57								60,00	68,57				65	68,57				108,33	100,00	
						Persentase kabupaten/ kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	%				65,7	90	71,40	74,30		88,57	90		74,30		134,81	100,00	0,00	100,00	
		Persentase kab/kota dengan peningkatan kinerja program PTM dan keswa	%	74,00	77,00								74,00	77,00				44,07	77,00				59,55	100,00	
						Persentase kabupaten/ kota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM	%				43	46	49,00	52,00		65,7	77,1		52,00		152,79	167,61	0,00	100,00	
		Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu	%	42,85	74,28								42,85	74,28				42,85	74,28				100,00	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100	100	Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%				75	100	100	100		75	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang	%	71,42	85,71								71,42	85,71				35,8	85,71				50,13	100,00	
						Persentase kabupaten/ kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Semarang	%				65,7	90	71,4	74,3		65,7	90		74,3		100,00	100,00	0,00	100,00	
		Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang	%	71,42	85,71								71,42	85,71				35,8	85,71				50,13	100,00	
						Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Semarang	%				43	46	49	52		43	46		52		100,00	100,00	0,00	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%				100	100	100	100		100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wil Semarang	%	91,30	91,30								91,00	91,30				93,75	91,30				103,02	100,00	
		Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Wilker Balkesmas	%	71,40	74,30								71,4	74,30				28,57	74,30				40,01	100,00	
						Persentase kabupaten/ kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Ambarawa	%				65,7	57,15	71,4	74,3		65,7	57,15		74,3		100,00	100,00	0,00	100,00	
		Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	%	49,00	52,00								49	52,00				28,57	52,00				58,31	100,00	
						Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan	%				43	42,85	49	52		43	42,85		52		100,00	100,00	0,00	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
						deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Ambarawa																				
		Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wil Ambarawa	%	91,00	91,00								91,00	91,00				91	91,00				100,00	100,00	
		Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Wilker Balkesmas Magelang	%	57,14	71,42								57,14	71,42				28,57	71,42				50,00	100,00	
						Persentase kabupaten/ kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Magelang	%				65,7	57	71,4	74,3		65,7	57		74,3		100,00	100,00	0,00	100,00	
		Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas	%	42,85	57,14								42,85	57,14				28,57	57,14				66,67	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Wilayah Magelang																							
						Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Magelang	%				43	43	49	52		43	43		52		100,00	100,00	0,00	100,00	
		Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wil Magelang	%	91,00	91,00								91,00	91,00				30	91,00		#DIV/0!	#DIV/0!	32,97	100,00	
		Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten	%	71,42	85,71								71,42	85,71				79,81	85,71		#DIV/0!	#DIV/0!	111,75	100,00	
						Persentase kabupaten/ kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Klaten	%				65,7	57	71,4	74,3		32,8	57		74,3		49,92	100,00	0,00	100,00	
		Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan	%	71,42	85,71								71,42	85,71				79,81	85,71		#DIV/0!	#DIV/0!	111,75	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten																							
						Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Klaten	%				43	46	49	52		21	43		52		48,84	93,48	0,00	100,00	
		Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wil Klaten	%	91,00	91,00								91,00	91,00				100	91,00		#DIV/0!	#DIV/0!	109,89	100,00	
		Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Wilker Balkesmas Pati	%	71,42	85,71								57,14	85,71				42,9	85,71		#DIV/0!	#DIV/0!	75,08	100,00	
						Persentase kabupaten/ kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Pati	%				65,7	57,14	71,4	74,3		65,7	57,14		74,3		100,00	100,00	0,00	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Pati	%	71,42	85,71								71,42	85,71				42,9	85,71			#DIV/0!	#DIV/0!	60,07	100,00	
						Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Pati	%				43	43	49	52		29	43		52		67,44	100,00	0,00	100,00	
		Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wil Pati	%	91,00	91,00								91,00	91,00				40	91,00		#DIV/0!	#DIV/0!	43,96	100,00	
		Persentase Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif	%	85,71	100								85,71	100				85,5	100		#DIV/0!	#DIV/0!	99,75	100,00	
						Persentase penanganan	%				57	71	86	100		57	82,86		100		100,00	116,70	0,00	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
						gangguan penglihatan dan pendengaran																			
		Persentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM	%	66,70	66,70								66,70	66,70				66,4	66,70		#DIV/0!	#DIV/0!	99,55	100,00	
		Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK	% (sertifikat)	4,00	4,00								4,00	4,00				1	4,00		#DIV/0!	#DIV/0!	25,00	100,00	
		Persentase Kab/Kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan	% kab/kota	35,00	35,00								(100) 35	35,00				(62,86) 22 kb/kt	35,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE !	100,00	
		Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	100						-	-	100	100		-	-	50	100		#VALUE !	#VALUE !	50,00	100,00	
		Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	100								100	100				77,78 (tw 3)	100		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE !	100,00	
		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	85,00	90,00	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							85,00	90,00				85	90,00		#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	
		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	100	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%				85	90	95	95		85	90	75	95		100,00	100,00	78,95	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	90,00	100								90,00	100				92,86 (tw 3)	100		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE !	100,00	
		Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	90,00	95,00								90,00	95,00				32,5 (tw 3)	95,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE !	100,00	
		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	100	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%				-	-	100	100		-	-	99,99 (tw3)	100		#VALUE !	#VALUE !	#VALUE !	100,00	
		Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	70,00	70,00	Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%				70	100	70,00	100		72,97	100	70,9	100		104,24	100,00	101,29	100,00	
		Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	91,00	92,00								91,00	92,00				96,71	92,00		#DIV/0!	#DIV/0!	106,27	100,00	
		Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih	%	34,00	35,00	Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih	%				32	33	34,00	35,00		-	82,23	63,75	35,00		#VALUE !	249,18	187,50	100,00	
		Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih	%	30,00	40,00	Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih	%				10,00	20,00	30,00	40,00		18	38,12	12,44	40,00		180,00	190,60	41,47	100,00	
		Persentase SDM Kesehatan dan	%	20,00	100,00	Persentase SDM Kesehatan dan Non	%				20,00	20,00	20,00	20,00	33,00	20,79	22/Capaian s.d. 2021 = 102	19,6	20,00	34,88	103,95	#VALUE !	98,00	100,00	105,70

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Non Kesehatan yang Terlatih				Kesehatan yang Terlatih																			
		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	100	100	Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%				18,00	19,00	20	21		18	19	60	21		100,00	100,00	300,00	100,00	
		Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	70,00	70,00	Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%				70,00	70,00	70,00	70,00	20,00	0	58,64	67,2	72,38	20,67	0,00	83,77	96,00	103,40	103,35
		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	98,00	100	Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%				97	98	98,00	100,00		0	145,42	100	100,00		0,00	148,39	102,04	100,00	
		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	88,00	89,00	Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%				86,00	87,00	88,00	89,00	30,00	55	88,49	90,21	94,00	98,00	63,95	101,71	102,51	105,62	326,67
		Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan	%	67,00	71,00								67,00	71,00				35	71,00		#DIV/0!	#DIV/0!	52,24	100,00	
						Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	%				57,00	71,00	83,00	100		58,84	75,75		100		103,23	106,69	0,00	100,00	
		Persentase kab/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	51,43	94,29								51,43	94,29				97,14	94,29				188,88	100,00	
		Persentase Kab/Kota yang di	%	71,42	85,71								71,42	85,71				35,8	85,71				50,13	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang																							
		Persentase Kab/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	%	71,00	86,00								71,00	86,00				28,57	86,00				40,24	100,00		
		Persentase Kab/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang	%	71,42	85,71								71,42	85,71				28,57	85,71				40,00	100,00		
		Persentase Kab/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten	%	71,42	85,71								71,42	85,71				60,21	85,71				84,30	100,00		
		Persentase Kab/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya	%	71,42	85,71								71,42	85,71				42,9	85,71				60,07	100,00		

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati																							
		Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran	%	50,00	55,00								50,00	55,00				49	55,00				98,00	100,00	
		Persentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK	%	58,00	60,00								58,00	60,00				48,28	60,00				83,24	100,00	
		Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	85,00	90,00	Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%				50,00	60,00	60,00	70,00		0	66,04	90,68	70,00		0,00	110,07	151,13	100,00	
		Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	20,00	100,00	Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%				15,00	15,00	20,00	40,00		0	54,35	11	40,00		0,00	362,33	55,00	100,00	
		Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan	%	20,00	100,00	Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%				20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	15,42	24,2	11,90	20,00	100,00	77,10	121,00	59,50	100,00	100,00

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Masyarakat Tingkat Provinsi																							
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	100	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%				20,00	15,00	15	10		20	15	75 *	10		100,00	100,00	#VALUE !	100,00	
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	100	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%				25,00	20,00	15	10	100	37,67	21,94	80,15*	10	100	150,68	109,70	#VALUE !	100,00	100,00
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	90,00	95,00	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%						90,00				102,43	86,3			#DIV/0!	#DIV/0!	95,89	#DIV/0!	
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	17,71	20,35	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%				21,24	23,00	19,47	18,59	100	7,54	60,53	34,99	59,06	100	35,50	263,17	179,71	317,70	100,00
						Persentase UCI desa	%				99,95	99,96	99,96	99,96		99,95	84,71		99,96		100,00	84,74	0,00	100,00	
						Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan					16	17	17,00	18,00		25	28,57		18,00		156,25	168,06	0,00	100,00	
						Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan					66	66	66	66		66	100		66		100,00	151,52	0,00	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
						Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan					70	80	80,00	80,00		100	72		80,00		142,86	90,00	0,00	100,00	
						Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan					90	90	90,00	90,00		100	100		90,00		111,11	111,11	0,00	100,00	
						Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%				85	90	95,00	95,00		80	90	75	95,00		94,12	100,00	78,95	100,00	
						Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	%				20	23	29,00	15,00		20	23	0	15,00		100,00	100,00	0,00	100,00	
						Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	%				21,76	21,76	21,76	22,71		100	100		22,71		459,56	459,56	0,00	100,00	
						Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan					21,3	21,88	23,32	23,51		100	100		23,51		469,48	457,04	0,00	100,00	
						Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan					90	85	90,00	95,00		100	100		95,00		111,11	117,65	0,00	100,00	
						Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan					80	85	90,00	95,00		100	100		95,00		125,00	117,65	0,00	100,00	
						Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan					100	100	100,00	100,00		100	100		100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	
						Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan					55	70	85,00	100,00		55	70		100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
						Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan	%				42,86	63	71,42	82,00		42,86	63	57,14	82,00		100,00	100,00	80,01	100,00	
						Cakupan penduduk miskin yang mempunyai jaminan kesehatan	%				100	100	100,00	100,00		100	100		100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	
						Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi	%				100	89,65	100,00	100,00		100	96,55		100,00		100,00	107,70	0,00	100,00	
						Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan primer sesuai ketentuan	%				23	29	31,00	34		23	29		34		100,00	100,00	0,00	100,00	
						Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Semarang	%				42,86	57,14	75,00	82		42,86	57,14		82		100,00	100,00	0,00	100,00	
						Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa	%				36	57,14	75,00	82		36	57,14		82		100,00	100,00	0,00	100,00	
						Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Magelang	%				36	57,14	75,00	82		42,8	57,14		82		118,89	100,00	0,00	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
						Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Klaten	%				42,86	57,14	75,00	82		42,86	57,14		82		100,00	100,00	0,00	100,00	
						Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Pati	%				42,86	57,14	75,00	82		42,86	57,14		82		100,00	100,00	0,00	100,00	
						Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan di BKIM	%				36	57,14	75,00	82,00		36	57,14		82,00		100,00	100,00	0,00	100,00	
						Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%				62,86	68,57	74,26	80,00					80,00		0,00	0,00	0,00	100,00	
						Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi	%				89,65	63	85,71	100		100	63		100		111,54	100,00	0,00	100,00	
						Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan di BalapkesPAK	%				42,86	57,14	75,00	82		42,86	57,14		82		100,00	100,00	0,00	100,00	
						Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan	%				57,00	71,00	85,00	100,00		57	71		100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
						kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Semarang																				
						Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Ambarawa	%				57,00	71,00	85,00	100,00		0	75,75		100,00		0,00	106,69	0,00	100,00	
						Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang	%				20,00	25,00	30,00	35,00		0	23		35,00		0,00	92,00	0,00	100,00	
						Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Klaten	%				20,00	25,00	30,00	35,00		0	22		35,00		0,00	88,00	0,00	100,00	
						Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Pati	%				57,00	71,00	85,00	100,00		0	71		100,00		0,00	100,00	0,00	100,00	
						Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai	%				20,00	25,00	30,00	35,00		20	26		35,00		100,00	104,00	0,00	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
						ketentuan yang berlaku di BKIM																				
						Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di BalapkesPAK	%				20,00	25,00	30,00	35,00		57	26		35,00		285,00	104,00	0,00	100,00	
						Proporsi pelatihan kesehatan sesuai standar	%				90,00	93,00	95,00	100,00		100	100	100	100,00		111,11	107,53	105,26	100,00	
						Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11%	%				37,14	40,00	42,86	45,70		71,42	100		45,70		192,30	250,00	0,00	100,00	
						Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Semarang	%				62,86	68,57	74,26	80,00		62,86	62,86		80,00		100,00	91,67	0,00	100,00	
						Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Semarang	%				29,00	43,00	57,00	71,00		29	45		71,00		100,00	104,65	0,00	100,00	
						Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Ambarawa	%				62,86	68,57	74,26	80,00		62,86	57,14	80	80,00		100,00	83,33	107,73	100,00	
						Persentase kabupaten/kota mencapai PHBS	%				29,00	43,00	57,00	71,00		29	45		71,00		100,00	104,65	0,00	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
						tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Ambarawa																				
						Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Magelang	%				14,28	22,85	28,57	37,14		14,28	57,14		37,14		100,00	250,07	0,00	100,00	
						Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Magelang	%				62,86	68,57	74,26	80,00		62,86	25		80,00		100,00	36,46	0,00	100,00	
						Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Klaten	%				62,86	68,57	74,26	80,00		57,14	57,14		80,00		90,90	83,33	0,00	100,00	
						Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Klaten	%				14,28	22,85	28,57	37,14		29	45		37,14		203,08	196,94	0,00	100,00	
						Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati	%				29,00	43,00	57,00	71,00		29	57,14		71,00		100,00	132,88	0,00	100,00	
						Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan	%				62,86	68,57	74,26	80,00		43	45		80,00		68,41	65,63	0,00	100,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
						cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Pati																				
						Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5%	%				14,28	22,85	28,57	37,14		14,28	23		37,14		100,00	100,66	0,00	100,00	
						Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di BalapkesPAK	%				62,86	68,57	74,26	80,00		62,86	68,57		80,00		100,00	100,00	0,00	100,00	
						Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%				8,42	8,42	8,42	8,42		21,71	21,83		8,42		257,84	259,26	0,00	100,00	
						Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%				20,00	23,00	24,00	27,00		20	100		27,00		100,00	434,78	0,00	100,00	
						Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%				30,00	30,00	30,00	30,00		30	30		30,00		100,00	100,00	0,00	100,00	
						Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%				16,84	16,84	16,84	16,84		16,84	16,84	-	-		100,00	100,00	#VALUE!	#VALUE!	
						Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100	100		100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	
						Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%				95,00	97,00	98,00	100,00		100	100		100,00		105,26	103,09	0,00	100,00	
						Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100	100,00	-	100,00		100,00	100,00	#VALUE!	100,00	
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Dr. Moewardi	%				80,50	81,00	82,00	100,00		99,89	108,44	87,75	100,00		124,09	133,88	107,01	100,00	
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%				67,00	69,00	71,00	75,00		78,6	78,00	78,00	75,00		117,31	113,04	109,86	100,00	
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Tugurejo	%				55,55	56,43	52,94	53,69	47,09	70	75	79	53,69	52,91	126,34	132,39	149,98	100,00	112,36
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. Rehatta	%				87,00	88,00	88,00	90,00		72	64	75,00			82,76	72,73	85,23	0,00	

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Renstra 2022-2023)				Indikator Kinerja (Renstra 2018-2021)	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan tahun (%)				
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%				32,00	35,00	42,00	45,00		46,4	45,50	63,94	38,71		145,00	130,00	152,24	86,02	
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Surakarta	%				30,00	32,00	33,00	35,00		36,45	70,23	27,45	35,00		121,50	219,47	83,18	100,00	
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%				43,00	44,00	45,00	46,00		58,75	63,93	58,18	46,00		136,63	145,30	129,29	100,00	

2.3.1.3 Kinerja Pelayanan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 6 UPT yang bertugas melaksanakan sebagai urusan Dinas Kesehatan. UPT tersebut meliputi :

. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Indonesia hanya memiliki 8 lembaga kalibrasi milik Kementerian Kesehatan yaitu 4 BPFK, 2 LPFK. Program kementrian seluruh fasilitas kesehatan terakreditasi sehingga keberadaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus mendapatkan penguatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan atau bahan ukur. Kalibrasi sebagai salah satu persyaratan akreditasi fasyankes. Jawa Tengah hanya mempunyai satu lembaga kalibrasi yang dimiliki Pemerintah, yaitu Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan (PAK) yang sudah memiliki gedung tersendiri berada di Jl.Halmahera 38A Semarang, terpisah dengan gedung lama. Hal ini akan dapat meningkatkan aksesibilitas pelayanan PAK. Ada banyak fasyankes yang membutuhkan kalibrasi antara lain jumlah RSU : 276; RSK 49; Puskesmas 881 ; Puskesmas Pembantu 1.666; laboratorium kesehatan daerah 35, dll. Hal tersebut membuat tingginya beban kerja lembaga kalibrasi dan menjadikan antrian yang cukup panjang untuk pelaksanaan kalibrasi di Jawa Tengah. Untuk mempercepat pelayanan kalibrasi di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah maka perlu dukungan pembiayaan berupa pemenuhan sarana prasarana, penambahan bangunan gedung pengujian alat kesehatan, pemenuhan sumber daya manusia dan anggaran pendukung pelayanan lainnya.

Manfaat :

1. Bagi fasyankes memberikan pelayanan yang optimal dengan memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, keselamatan masyarakat
2. Bagi pemerintah provinsi memberikan jaminan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat se Jawa Tengah dan PAD
3. Bagi Dinas Kesehatan memberikan jaminan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat se Kab/ Kota
4. Bagi masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan laik pakai alat kesehatan

Pengaturan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan bertujuan untuk :

1. Memberikan acuan bagi pemerintah , pemda dan masyarakat dalam pelaksanaan pengujian dan/ atau kalibrasi alat kesehatan
2. Menjamin tersedianya alat kesehatan yang sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan

dan laik pakai di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya, dan

3. Meningkatkan akuntabilitas dan mutu pelayanan Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan dalam Pengujian dan/ atau Kalibrasi alat kesehatan.

Alat kesehatan yang dilakukan Pengujian dan/ atau Kalibrasi alat kesehatan merupakan peralatan yang digunakan untuk keperluan diagnosa, terapi, rehabilitasi dan penelitian medik baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki parameter penunjukkan, keluaran atau kinerja. Layanan kalibrasi dilakukan untuk alat-alat kesehatan di Puskesmas. Petugas kalibrasi hanya melakukan kalibrasi tidak melakukan treatment.

b. Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Wilayah Pati, Ambarawa, Magelang dan Klaten

Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memiliki 4 (empat) Balkesmas yang masing-masing mempunyai 7 (tujuh) wilayah kerja, yaitu:

1. Balkesmas Wilayah Pati meliputi Kabupaten Blora, Rembang, Pati, Jepara, Kudus, Demak, dan Purwodadi.
2. Balkesmas Wilayah Ambarawa meliputi Kabupaten Semarang, Kendal, Batang, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, dan Kota Salatiga.
3. Balkesmas Wilayah Magelang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Purworejo, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap.
4. Balkesmas Wilayah Klaten meliputi Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Kota Surakarta, Kab. Wonogiri, Sragen dan Karanganyar.

Balkesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan strata II, memberikan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, melalui upaya pencegahan, promosi, pengobatan, dan pemulihan kesehatan. Semua upaya tersebut dilakukan agar masyarakat mempunyai akses yang mudah terhadap informasi dan pelayanan kesehatan.

Saat ini pelayanan kesehatan yang bermutu sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu perlu didukung dengan SDM yang kompeten, sarana prasarana maupun bahan penunjang lainnya yang sesuai dengan

standar Balai Kesehatan Masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan kepada pasien dan masyarakat, Balkesmas berupaya untuk memenuhi sarana prasarana pelayanan, meningkatkan SDM kesehatan, memenuhi kebutuhan penunjang pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, rujukan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu Balkesmas juga aktif berkonsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan berkoordinasi dengan lintas sektor dan terkait khususnya dalam penanganan masalah kesehatan di Wilayah kerjanya.

Jenis layanan di Balkesmas dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), terdiri dari:
   . Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit:
      1) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit di Balkesmas
   b. Program Kesehatan Masyarakat:
      1) Kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
      2) Promosi dan pemberdayaan kesehatan
      3) Peningkatan pelayanan kesmas di UPT
   c. Program Pelayanan Kesehatan:
      1) Pelayanan kesehatan rujukan
      2) Upaya penurunan kesakitan dan kematian melalui kegiatan promotif/ preventif dan kuratif / rehabilitatif di UPT.
      3) Peningkatan pelayanan kesehatan di UPT
      4) Pengelolaan jasa pelayanan di UPT
2. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) terdiri dari:
   a. Pelayanan Unit Gawat Darurat dan ruang observasi
   b. Pelayanan klinik Umum
   c. Pelayanan klinik spesialis
   d. Pelayanan klinik TB
   e. Pelayanan klinik non TB
   f. Pelayanan klinik rehabilitasi medik dan kebugaran
   g. Pelayanan klinik berhenti merokok
   h. Pelayanan laboratorium
   i. Pelayanan radiologi
   j. Pelayanan farmasi
   k. Pelayanan penyuluhan individu

c. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi

Kegiatan yang dilaksanakan di Bapelkes Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Peningkatan Mutu Bapelkes Provinsi Jawa Tengah.

   Kegiatan peningkatan mutu Bapelkes Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pelayanan di Bapelkes Provinsi Jawa Tengah.

2. Kegiatan peningkatan fungsi Bapelkes Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung percepatan pencapaian goal program prioritas.

   Kegiatan pelatihan di Bapelkes Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan sehingga dapat menurunkan dan mencegah stunting, deteksi dini penyakit PTM terutama keganasan dan kasus-kasus kesehatan spesifik seperti DBD, TB Paru dan HIV
3. Pencapaian indikator yang ditetapkan RPJMD 2019-2024 serta visi Misi Gubernur Jawa Tengah 2019-2024

Capaian indikator kinerja Balai Pelatihan Provinsi Jawa Tengah 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Proporsi Pelatihan Kesehatan sesuai standar adalah jumlah pelatihan kesehatan yang dilaksanakan di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dibagi jumlah pelatihan yang mendapatkan sertifikat akreditasi pelatihan kali seratus persen. Proporsi Pelatihan Kesehatan terakreditasi yang harus dicapai adalah 100%
2. *Minimal Complaint Rate* Penyelenggaraan pelatihan adalah jumlah peserta pelatihan yang menilai kurang pada item penilaian evaluasi penyelenggaraan pelatihan dibagi jumlah peserta seluruhnya dikalikan seratus persen. *Minimal Complaint Rate* yang harus dicapai adalah kurang dari 10%
3. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkewajiban mendokrak/mendukung capaian indikator RPJMD maupun SPM di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Isu SDM kesehatan menjadi semakin strategis sejalan dengan berlakunya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk dengan penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2014 membutuhkan ketersediaan SDM kesehatan dalam jumlah, jenis dan mutu yang memadai dan terdistribusi dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia khususnya bidang kesehatan melalui diklat Sumber daya manusia (SDM) merupakan sesuatu yang harus ditempuh. Diklat mempunyai peranan dan kedudukan yang strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Penyelenggaraan diklat harus mampu mengkaji dan mendesain diklat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dirancang sesuai dengan tujuan diklat yaitu meningkatkan sumber daya manusia baik peningkatan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan bertujuan meningkatkan mutu dan kompetensi sumber daya manusia di bidang

kesehatan agar dapat meningkatkan kinerja dan mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, memperkuat tim kerja, serta menunjang pengembangan karier serta kegiatan berupa pelatihan peningkatan kapasitas SDM lainnya dengan sumber anggaran (DBHCHT).

2.3.1.4 Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 8 Rumah Sakit Daerah yang bertugas melaksanakan sebagai urusan Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Daerah tersebut meliputi :

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi

   Pelayanan di RSUD Dr. Moewardi dikembangkan untuk mendukung program prioritas nasional, diantaranya RSUD Dr. Moewardi mengembangkan pelayanan unggulan :

   A. Layanan Unggulan
      1) Layanan Jantung Terpadu
      2) Layanan Kanker Terpadu
   B. Layanan Inovatif
      1) Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu (Klinik Sekar)
      2) Hemodialisa, CAPD dan Hipertensi
      3) MRI
      4) CT Scan
      5) TMS
      6) Neurologi Interfensi
      7) Radiologi Interfensi
      8) Home Visite
      9) Layanan Penelitian berbasis Pelayanan Sel Punca (*Stem Cell*)
   C. Layanan Gawat Darurat
      1) Hotline Gawat Darurat
      2) Prehospital
      3) Triage, Observasi, Medikal, Bedah Minor, Resutisasi
      4) Maternitas
      5) Trauma
      6) Nyeri dada
      7) Stroke
   D. Layanan Rawat Inap
   E. Layanan Rawat Jalan
      1) Klinik Anak
      2) Klinik Jiwa
      3) Klinik Geriati
      4) Klinik Obsgyn
      5) Klinik Paru
      6) Klinik Bedah
      7) Klinik Mata
      8) Klinik Gigi dan Mulut

9) Klinik Penyakit Dalam
10) Klinik Saraf
11) Klinik Jantung
12) Klinik THT
13) Klinik Kulit dan Kelamin
14) Klinik Metadon
15) Klinik VCT
16) Klinik Nyeri
17) Klinik Psikologi
18) Klinik MCU
19) Klinik Endoskopi

F. Layanan Penunjang
1) Radiologi
2) Laboratorium Patologi Klinik
3) Laboratorium Mikrobiologi
4) Laboratorium Patologi anatomi
5) Farmasi
6) Gizi
7) Uni Transfusi Darah Rumah Sakit
8) Rehabilitasi Medik
9) Radioterapi

G. Layanan Intensif
1) ICVCU (*Intensive Cardiovascular Care Unit)*
2) ICU *Covid*-19
3) ICU Mawar
4) NICU
5) HCU Jantung
6) HCU Cempaka
7) HCU Anggrek
8) HCU Neunatus (*Prinatologi*)
9) HCU Anak

2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekardjo
Pencapaian kinerja pelayanan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo antara lain :
a. Angka kematian Bersih/ Net Death Rate (NDR) >48 jam;
b. Prosentase pemenuhan akreditasi pada unit Pelayanan;
c. Prosentase jumlah SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi;
d. Prosentase capaian penerapan manajemen operasional berorientasi pada pelanggan dan kesejahteraan *Cost.*

Jenis-jenis pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo berbasis *Patient Safety*, yaitu:
1. Peayanan Rawat Darurat;
2. Pelayanan Rawat Jalan;

3. Pelayanan Rawat Inap;
4. Pelayanan Rawat Intensif;
5. Pelayanan Bedah Sentral;
6. Pelayanan Kebidanan;
7. Pelayanan Rehabilkitasi Medik;
8. Pelayanan Radiologi;
9. Pelayanan Farmasi RS;
10. Pelayanan Gizi RS;
11. Pelayanan Radioterapi;
12. Pelayanan Laboratorium Patalogi Klinik;
13. Pelayanan Laboratorium Anatomi;
14. Pelayanan Hemodialisa;
15. Pelayanan Transfusi Darah;
16. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan SDM;
17. Pelayanan Pengolahan limbah RS;
18. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
19. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah RS;
20. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS;
21. Pelayanan Administrasi (RT, Keuangan, Kendaraan Dinas, Keamanan, Manajemen, SIM, Rekam Medis, Pemasaran dan Perpustakaan).

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Adhyatma M.PH

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, RSUD dr. Adhyatma, MPH merupakan rumah sakit pendidikan utama untuk Fakultas Kedokteran. Selain digunakan oleh Fakultas Kedokteran, RSUD dr. Adhyatma, MPH juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan lain. Sebagai Rumah Sakit Pendidikan, RSUD dr. Adhyatma, MPH menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara terpadu dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan. Selain sebagai Rumah Sakit Pendidikan, RSUD dr. Adhyatma, MPH juga merupakan institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang tersertifikasi dengan akreditasi A berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/F/2286/2023 tanggal 25 September 2023.

Pelayanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH dikembangkan untuk mendukung program prioritas nasional, diantaranya RSUD dr. Adhyatma, MPH mengembangkan pelayanan unggulan :

1. Layanan Kanker;
2. Layanan Jantung;
3. Layanan Uronefrologi;

4. Layanan Bedah Digestif.

Selain pelayanan unggulan, RSUD dr. Adhyatma, MPH juga mengembangkan pelayanan diantaranya:

1. Pelayanan spesialis dasar :
   - Kebidanan
   - Anak
   - Penyakit Dalam
   - Bedah Umum
2. Pelayanan spesialis penunjang :
   - Patologi Klinik
   - Mikrobiologi
   - Patologi Anatomi
   - Anestesi
   - Radiologi
   - Rehabilitasi Medik
   - Gizi Klinik
   - Forensik
3. Pelayanan spesialis lain :
   - Paru
   - Orthopedi
   - Mata
   - Kulit kelamin
   - THT
   - Gigi dan Mulut (Konservasi, Bedah Mulut)
   - Psikiatri
   - Saraf
   - Bedah onkologi
   - Bedah saraf
   - Bedah anak
   - Bedah digestif
   - Bedah plastik
   - Bedah thorax cardio vasvuler
   - Bedah vasculer
   - Urologi
   - Jantung
4. Pelayanan lain :
   - TB Dots
   - VCT
   - Ponek
   - Napza
   - Tumbuh kembang
   - Psikologi
   - Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)
   - Geriatri
5. Instalasi / pelayanan lain :

- Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Instalasi Bedah Sentral (IBS)
- Hemodialisa
- Laboratorium Patologi Klinik
- Laboratorium Patologi Anatomi
- Laboratorium Mikrobiologi
- Laboratorium Bank Darah
- Instalasi Radiologi
- Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal
- Instalasi Sanitasi
- Instalasi CSSD dan Laundry
- IPSRS
- Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)
- Instalasi Rehabilitasi Medik
- Instalasi Gizi
- Intensive Care (ICU, PICU, NICU, HCU, ICVCU)
- Instalasi Radioterapi
- Instalasi Farmasi

4. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rehatta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Kelas C, RSUD dr. Rehatta mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Wilayah cakupan pelayanan RSUD dr. Rehatta relatif sempit meliputi delapan kecamatan diwilayah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, antara lain:

a. Kabupaten Jepara
    1) Kecamatan Keling
    2) Kecamatan Donorojo
    3) Kecamatan Kembang
    4) Kecamatan Bangsri
b. Kabupaten Pati
    1) Kecamatan Cluwak
    2) Kecamatan Gunungwungkal
    3) Kecamatan Dukuhseti
    4) Kecamatan Tayu

Berikut adalah data eksisting perkembangan jenis informasi pelayanan yang ada di RSUD dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah, diantaranya yaitu :

a. Pelayanan Rawat Jalan
    1) Rawat Jalan Gigi
    2) Psikolog

3) Hemodialisa
4) Rawat Jalan Kusta

b. Pelayanan Spesialistik
1) Penyakit Dalam
2) Anak
3) Bedah
4) Obstetri dan Ginekologi
5) Kulit dan Kecantikan
6) THT
7) Psikiatri
8) Orthopedi
9) Bedah Onkologi
10) Syaraf
11) Rehabilitasi Medik

c. Pelayanan Rawat Inap
1) Rawat Inap Penyakit Dalam
2) Rawat Inap Bedah
3) Rawat Inap Anak
4) Rawat Inap Kebidanan
5) Rawat Inap Kusta
6) Rawat Inap Isolasi

d. Pelayanan Gawat Darurat
e. Pelayanan Bedah Sentral
f. Pelayanan ICU
g. Pelayanan Penunjang
1) Laboratorium
2) Radiologi
3) Fisioterapi
4) Ortotik Prostetik
5) Farmasi
6) Gizi
7) Rekam Medis
8) Laundry dan CSSD
9) Pemulasaran Jenazah
10) Pemeliharaan sarana dan Prasarana Medis

h. Pelayanan Rumah Tangga dan Umum
1) Pelayanan ambulance
2) Pemeliharaan sarana dan Prasarana
3) Pelayanan Diklat

5. Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Amino Gondohutomo

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas Gubernur Jawa Tengah dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo mengembangkan layanan unggulan yaitu layanan Rehabilitasi NAPZA.

Berdasarkan Peraturan Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pasien RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dapat dilayani di rumah sakit terdiri atas :

a. Pelayanan rawat jalan meliputi :
    1) Pelayanan Psikiatri Dewasa
    2) Pelayanan Psikiatri Anak
    3) Pelayanan Psikogeriatri
    4) Pelayanan Psikiatri Forensik
    5) Pelayanan Psikiatri Komunitas
    6) Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
    7) Pelayanan Rehabilitasi Medis
    8) Pelayanan Neurologi
    9) Pelayanan Penyakit Dalam
    10) Pelayanan Kesehatan Anak
    11) Pelayanan Obgyn
    12) Pelayanan Bedah
    13) Pelayanan Gigi
    14) Pelayanan Bedah Mulut Maksilofasial
    15) Pelayanan Psikologi dan Konseling
    16) Pelayanan Terpadu Napza dan Adiksi
    17) Pelayanan Terpadu PKPA (PPT Sehat Jiwa Amino)
    18) Pelayanan Psikometri
    19) Pelayanan ECT (Electro Convulsive Therapy)
    20) Pelayanan Surat Mediko Legal (Surat Keterangan Narkotika, Surat Keterangan Sehat Jiwa, Surat Keterangan Sehat Fisik)
    21) Pelayanan untuk kepentingan asuransi kesehatan
    22) Pelayanan Telemedicine/Telekonseling
    23) Pelayanan Terpadu Tumbuh Kembang Jiwa Anak
    24) Pelayanan Psikoterapi
    25) TB DOTS
    26) HIV (Penegakan diagnosis, IPCT, Pelayanan penunjang pengobatan)
b. Pelayanan gawat darurat meliputi :
    1) Gawat Darurat Psikiatri
    2) Gawat Darurat Non Psikiatri
c. Pelayanan rawat inap meliputi :
    1) Rawat inap Psikiatri Dewasa
    2) Rawat inap Psikiatri Anak
    3) Rawat inap Psikogeriatri
    4) Rawat inap Psikiatri Forensik
    5) Pelayanan Unit Intensif Psikiatri
    6) Rawat inap Psikiatri Akut
    7) Rawat inap Psikiatri dengan Komorbiditas Fisik
    8) Rawat inap Neurologi dan Penyakit Dalam

9) Rawat inap Anak
10) Rawat inap Perinatologi
11) Rawat inap Obgyn
12) Rawat inap Bedah dan Bedah Mulut
13) Rawat inap isolasi

d. Pelayanan ECT (Electro Convulsive Therapy)
e. Pelayanan Bedah Sentral
f. Rawat Intensif (ICU/PICU/NICU)
g. Pelayanan penunjang meliputi :
1) Laboratorium
2) Pelayanan Darah (BDRS)
3) Radiologi
4) Gizi
5) Farmasi
6) Limbah dan Sanitasi
7) Laundry dan CSSD
8) Pemulasaran Jenazah
9) Pemeliharaan sarana dan prasarana medis
h. Pelayanan Rumah Tangga dan Umum meliputi :
1) Pelayanan Ambulance
2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
3) Pelayanan Diklat

6. Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) dr. Arif Zainudin

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan Rumah sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan. Pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin, berdasarkan Peraturan Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Nomor 188/14894 tentang Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa tengah. Berikut adalah pelayanan yang dilayani :

A. Pelayanan berdasarkan usia :
1) Anak : usia 0 - $\leq$18 tahun
2) Dewasa : usia > 18 s.d < 60 tahun
3) Lansia : usia $\geq$ 60 tahun

B. Pelayanan rawat jalan, meliputi :
1) Pelayanan kedokteran jiwa dewasa
2) Pelayanan psikogeriatri
3) Pelayanan psikiatri forensik
4) Pelayanan psikoterapi dan konseling
5) Pelayanan NAPZA
6) Pelayanan kedokteran jiwa anak dan remaja

7) Pelayanan surat mediko legal (surat keterangan narkotika, surat keterangan sehat jiwa, surat keterangan sehat fisik, surat keterangan visum et repertum psikiatrum)
8) Pelayanan psikometri
9) Pelayanan saraf
10) Pelayanan penyakit dalam
11) Pelayanan kesehatan anak
12) Pelayanan kulit dan kelamin
13) Pelayanan gigi dan mulut
14) Pelayanan kedokteran fisik dan rehabilitasi
15) Pelayanan rehabilitasi psikososial (*day care*)

C. Pelayanan gawat darurat, meliputi :
1) Gawat darurat psikiatri
2) Gawat darurat non psikiatri

D. Pelayanan rawat inap, meliputi :
1) Rawat inap psikiatri anak dan remaja
2) Rawat inap psikiatri dewasa
3) Rawat inap gangguan mental organik
4) Rawat inap psikiatri akut / intensif (UPIP)
5) Rawat inap neurotik
6) Rawat inap psikogeriatri
7) Rawat inap NAPZA
8) Rawat inap psikiatri dengan komorbiditas fisik
9) Rawat inap saraf, penyakit dalam, anak dan kulit kelamin
10) Rawat inap penyakit infeksi *Emerging* (PIE)

E. Pelayanan Psikologi;
F. Pelayanan rehabilitasi psikososial;
G. Pelayanan rehabilitasi medik;
H. Pelayanan ECT (Electro Convulsive Therapy);
I. Rawat Intensif ICU;
J. Pelayanan penunjang, meliputi :
1) Farmasi
2) Laboratorium klinik
3) Elektrodiagnostik dan elektroterapi
4) Radiologi
5) Sanitasi
6) Gizi
7) Laundry
8) Pemeliharaan sarana dan prasarana medis

K. Pelayanan rumah tangga dan umum, meliputi :
1) Pelayanan ambulance
2) Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

7. Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. RM Soedjarwadi

RSJD Dr. RM Soedjarwadi mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna. Guna mewujudkan tugas tersebut RSJD Dr. RM. Soedjarwadi mengembangkan layanan unggulan yaitu Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.

Berdasarkan Keputusan Direktur No 445/12847 Tahun 2024, jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dapat dilayani di rumah sakit terdiri atas :

1. Pelayanan IGD
    - Kegawatdaruratan Psikiatri
    - Kegawatdaruratan Non-Psikiatri
2. Pelayanan Klinik Rawat Jalan
    - Klinik Jiwa Dewasa
    - Klinik Jiwa Lansia (Psikogeriatri)
    - Klinik Ketergantungan Obat/NAPZA
    - Klinik Gangguan Mental Organik
    - Klinik Psikoterapi (Konseling)
    - Klinik Psikologi
    - Klinik Penyakit Dalam
    - Klinik Penyakit Saraf
    - Klinik Kesehatan Gigi Dan Mulut
    - Klinik Penyakit Anak
    - Klinik Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)
    - Klinik Voluntary Counselling And Testing (VCT)
    - Klinik Nyeri
    - Klinik Akupunktur
    - Klinik Okupasi terapi
    - Klinik Terapi Wicara
    - Klinik Fisioterapi
    - Klinik Bedah
    - Klinik Kebidanan dan Kandungan
3. Pelayanan Klinik Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja
4. Pelayanan Intensif Psikiatri
    - Intensif Psikiatri Putra (Ruang Edelweis)
    - Intensif Psikiatri Putri (Ruang Lavender)
5. Pelayanan Rawat Inap Psikiatri
    - Ruang Rawat Inap Dewandaru
    - Ruang Rawat Inap Flamboyan
    - Ruang Rawat Inap Geranium
    - Ruang Rawat Inap Helikonia
    - Ruang Rawat Inap Ivy (Psikogeriatri)
6. Pelayanan Rehabilitasi Ketergantungan Obat /Napza (Ruang Jasmine)
7. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
    - Rehabilitasi Pasien Rawat Inap Jiwa
    - Rehabilitasi Pasien Rawat Jalan Jiwa (Day Care)

8. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas)
9. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)
10. Pelayanan Rawat Inap Non-Psikiatri
    - Ruang Rawat Inap Camelia
    - Ruang Rawat Inap Bougenville/Unit Stroke
    - Ruang rawat Inap Anak (Anggrek)
    - Ruang Operasi
    - Ruang Bersalin
    - Ruang Perawatan Intensif Bayi (Perinatologi)
11. Pelayanan Laboratorium
12. Pelayanan Radiologi
13. Pelayanan Farmasi
14. Pelayanan Elektrodiagnostik Dan Elektroterapi
15. Pelayanan Medico Legal
16. Pelayanan Forensik (Visum Et Repertum Psikiatrikum)
17. Pelayanan Hemodialisis

8. Rumah Sakit Mata (RSMD) Soepardjo Roestam

Rumah Sakit Mata Daerah (RSMD) Soepardjo Roestam mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan mata dengan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Pelayanan dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pelayanan kesehatan yang ada di RSMD Soepardjo Roestam merupakan penggabungan antara pelayanan yang ada di BKIM (Balai Kesehatan Indera Masyarakat) Provinsi Jawa Tengah dan Balkesmas (Balai Kesehatan Masyarakat) Wilayah Semarang, yang terdiri dari :

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan Spesialistik
    a. Klinik Mata
        - Sub Vitreoretinal
        - Sub Onkologi, okuloplasti dan rekonstruksi
        - Sub Glaukoma
        - Sub Neuro oftalmologi
        - Sub oftalmologi pediatrik dan strabismus
        - Sub katarak dan bedah refraksi
        - Sub infeksi dan imunologi
        - Sub refraksi, lensa kontak dan low vision
        - Sub oftalmologi komunitas
    b. Klinik Penyakit Dalam
    c. Klinik Anak
    d. Klinik Paru
    e. Klinik Jiwa

f. Klinik Rehabilitasi Medik

3. Pelayanan Rawat Inap
   a. Rawat Inap Mata
   b. Rawat Inap Anak
   c. Rawat Inap Regular
   d. Rawat Inap Isolasi
4. Pelayanan Bedah Sentral
5. Pelayanan ICU
6. Pelayanan Penunjang
   a. Optik
   b. Laboratorium
   c. Radiologi
   d. Fisioterapi
   e. Farmasi
   f. Gizi
   g. Rekam Medis
   h. Laundry dan CSSD
   i. Transit Jenazah
   j. Pemeliharaan sarana dan prasarana medis
7. Pelayanan Rumah Tangga dan Umum
   a. Pelayanan Ambulance
   b. Pemeliharaan sarana dan prasarana
   c. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

2.3.2 Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah dari 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.9

Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan dan

Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai dengan tahun (Rp.000)					Rasio realisasi dan anggaran tahun/sampai dengan tahun (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	DINAS KESEHATAN																						
1	Pendapatan	32.000.000	27.879.519	26.284.477	28.993.000	29.000.733	23.765.986	20.000.000	21.600.000	28.998.231	29.000.733	19.437.054	17.243.155	25.944.043	31.138.523	30.150.207	81,79	86,22	120,11	107,38	103,96	6,6	14,01
2	Belanja	545.133.904	784.451.969	763.251.055	776.674.367	596.878.921	508.083.207	784.451.969	677.130.714	776.674.367	584.428.865	467.376.417	689.690.677	662.666.363	697.210.912	567.662.738	91,99	87,92	97,86	89,77	97,13	7,67	7,57
3	Pembiayaan																						
	RSUD DR MOEWARDI																						
1	Pendapatan	697.133.100	706.000.000	710.000.000	785.000.000	812.500.000	723.840.000	710.000.000	732.044.818	8.000.000.000	1.010.000.000	932.702.211	1.096.083.274	893.806.891	1.040.539.904	1.077.369.981	128,85	154,38	122,10	130,07	106,67	226,66	4,75
2	Belanja	795.515.000	841.741.614	761.397.225,00	794.826.000,00	1.422.594.778,00	795.515.000	841.741.614	761.397.225,00	794.826.000,00	1.422.594.778,00	830.615.464	933.812.198	1.010.812.777	1.355.345.243	1.397.538.202	95,58	86,47	89,04	170,52	98,24	19,91	14,47
3	Pembiayaan																						
	RSUD PROF DR MARGONO SOEKARDJO																						
1	Pendapatan	370.000.000	375.000.000	382.268.406	404.000.000	575.000.000	370.000.000	375.000.000	382.268.406	404.000.000	575.000.000	428.494.231	555.980.035	512.016.637	574.840.672	787.470.829	114	148	134	142	137		
2	Belanja	607.739.910	613.331.603	760.224.176	798.953.488	907.519.916	607.739.910	613.331.603	760.224.176	798.953.488	907.519.916	545.128.210	528.783.630	614.685.334	754.920.417	849.610.474	89,7	86,21	80,86	94,49	93,62		
3	Pembiayaan																						
	RSUD DR. ADHYATMA																						
1	Pendapatan	157.000.000	162.000.000	167.000.000	172.000.000	174.000.000	145.119.000	167.188.000	164.000.000	172.200.000	175.000.000	170.706.555	221.383.395	201.494.647	168.960.782	168.144.171	117,63	132,42	122,86	98,12	96,08	4,98	1,02
2	Belanja	208.642.046	209.400.000	233.900.000	234.750.150	325.000.000	254.125.061	334.306.289	366.800.146	406.493.961	371.834.980	243.228.509	296.318.332	289.803.437	313.104.965	317.774.355	95,71	88,64	79,01	77,03	85,46	10,89	7,29
3	Pembiayaan																						
	RSUD. DR. REHATTA																						
1	Pendapatan	34.586.524	37.000.000	41.374.000	47.580.100	62.000.000	34.586.524	37.000.000	41.374.000	47.580.100	62.000.000	34.802.451	49.509.559	49.303.125	46.296.157	63.114.666	100,62	133,81	119,16	97,30	101,80	16,03	18,02

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai dengan tahun (Rp.000)					Rasio realisasi dan anggaran tahun/sampai dengan tahun (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	Belanja	81.831.731	93.343.102	103.762.538	103.411.282	161.386.663	81.831.731	93.343.102	103.762.538	103.411.282	161.386.663	77.611.162	84.388.254	98.718.536	97.052.092	159.160.157	94,84	90,41	95,14	93,85	98,62	20,24	22,00
3	Pembiayaan																						
	RSJD dr. AMINO GONDOHUTOMO																						
1	Pendapatan	47.600.000	53.000.000	54.000.000	55.000.000	49.419.000	47.600.000	53.000.000	54.000.000	49.700.000	54.000.000	53.363.009	51.102.616	74.960.514	50.961.111	54.927.477	112,11	96,42	138,82	102,54	101,72		
2	Belanja	76.025.000	81.750.000	87.550.000	89.050.000	115.000.000	124.229.737	129.989.799	129.823.465	157.902.485	172.054.321	115.002.092	112.319.166	117.229.058	131.635.457	149.721.100	92,57	86,41	90,30	83,37	87,02		
3	Pembiayaan																						
	RSJD. dr. ARIF ZAINUDIN																						
1	Pendapatan	38.000.000	40.000.000	42.500.000	45.000.000	42.500.000	28.500.000	41.103.300	36.000.000	45.000.000	45.500.000	34.540.247	76.247.668	34.951.607	40.405.230	46.270.081	121,19	185,50	97,09	89,79	101,69	14,48	24,18
2	Belanja	86.900.000	111.700.000	130.750.000	124.100.000	112.000.000	101.070.795	129.607.715	170.008.824	162.278.236	161.177.732	94.754.850	109.683.220	138.467.597	131.390.555	146.594.598	93,75	84,63	81,45	80,97	90,95	13,55	12,11
3	Pembiayaan																						
	RSJD dr RM.. SOEDJARWADI																						
1	Pendapatan	48.250.000	48.500.000	48.750.000	49.000.000	46.500.000	33.000.000	40.000.000	42.000.000	40.000.000	50.000.000	42.374.102	56.532.542	42.517.096	42.869.467	56.167.483	128,41	141,33	101,23	107,17	112,33	11,61	10,12
2	Belanja	78.725.000	86.500.000	913.888.760	88.920.263	1.000.000.000	82.219.278	96.037.397	111.852.072	109.716.701	121.430.121	80.191.281	88.424.659	89.029.568	99.553.483	117.717.441	97,53	92,07	79,60	90,74	96,94	10,51	10,25
3	Pembiayaan																						

Rasio realisasi pendapatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan dari 107,38 menjadi 103,96, hal tersebut dikarenakan adanya pembangunan gedung rumah sakit khusus mata di UPT BKIM Provinsi Jawa Tengah dan UPT Balkesmas Wilayah Semarang; keterbatasan SDM Dokter Spesialis di Balkesmas Wilayah Magelang. Upaya dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan yaitu dengan membuka pelayanan pemeriksaan haji, kemitraan dengan dokter spesialis, layanan pemeriksaan MCU, mengusulkan peremajaan sarpras di UPT, membuka pelayanan rawat inap, mengusulkan kebutuhan SDM, promosi pelayanan media elektronik dan media sosial, kemitraan dengan Kabupaten/Kota untuk kegiatan diklat di Bapelkes Provinsi. Sedangkan pada realisasi anggaran belanja pada tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan dari 89,77 menjadi 97,13 hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi secara rutin atas target yang sudah ditetapkan melalui rencana kerja operasional, melakukan evaluasi secara rutin melalui rakor POK, untuk kegiatan-kegiatan yang diprediksi tidak dapat dilakukan maka diarahkan untuk dilakukan perubahan guna mendukung program prioritas lainnya.

Pada Rumah Sakit Daerah juga terdapat kenaikan dan penurunan rasio realisasi pendapatan dan belanja, yang mengalami kenaikan rasio realisasi pendapatan pada Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 ke tahun 2024 antara lain, RSUD dr. Rehatta dari 97,30 menjadi 101,80; RSJD dr. Arif Zainudin dari 89,79 menjadi 101,69; RSJD dr. RM. Soedjarwadi dari 107,17 menjadi 112,33. Sedangkan rasio realisasi belanja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 ke 2024 mengalami adanya penurunan yaitu RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo dari 94,49 menjadi 93,62.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut tabel pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan dan
Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Masalah Pokok (Tujuan dan sasaran)	Masalah (Strategi)	Akar Masalah (Program Kegiatan)
1	**DINAS KESEHATAN**		
	PM dan PTM		
	Masih adanya beban penyakit menular terabaikan dan mobilitas wilayah yang menyebabkan penyakit	Masih tingginya penemuan kasus penyakit menular langsung	Tingginya penularan kasus dan penemuan yang terlambat

No	Masalah Pokok (Tujuan dan sasaran)	Masalah (Strategi)	Akar Masalah (Program Kegiatan)
	menular baru serta zoonosis		
		Masih rendahnya upaya penurunan kasus tular vektor dan pengendalian risiko	Tatalaksana kasus yang ditemukan belum sesuai standar
			Belum optimalnya komitmen kapasitas aksi bersama antar *stakeholder* dalam tatalaksana kasus
		Masih rendahnya cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan surveilans berbasis laboratorium dan masyarakat	Masih adanya KLB/wabah, keracunan makanan
			Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penemuan kasus
	Perubahan gaya hidup yang memicu transisi epidemiologi mengarah pada peningkatan kasus tidak menular dan kesehatan jiwa	Masih rendahnya cakupan skrining PTM dan kesehatan jiwa	Terbatasnya sumber daya skrining PTM dan kesehatan jiwa
			Masih rendahnya ketepatan dan kelengkapan pencatatan pelaporan
		Angka kekambuhan pasien jiwa yang tinggi	Belum optimalnya dukungan sosial terhadap ODGJ pasca perawatan
	Kasus Kematian Ibu dan Balita		
	Masih kurangnya komitmen tenaga medis di fasyankes dalam melaksanakan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Masih kurangnya sumber daya di fasilitas kesehatan	Tatalaksana belum dilaksanakan sesuai standar
	Belum optimalnya implementasi terkait dengan rekomendasi pelaksanaan AMPSR	Masih kurangnya komitmen tenaga medis di fasilitas kesehatan dalam melaksanakan rekomendasi	Adanya perubahan kebijakan dalam pelaksanaan AMPSR di fasilitas kesehatan (SOP, kemampuan dan kompetensi Nakes)
		Masih kurangnya peran komite AMPSR di kab/kota sesuai fungsinya	Masih terbatasnya jumlah SDM kesehatan di kab/kota dalam pendampingan AMPSR

No	Masalah Pokok (Tujuan dan sasaran)	Masalah (Strategi)	Akar Masalah (Program Kegiatan)
			Belum optimalnya komitmen kapasitas aksi bersama antar *stakeholder* dalam tatalaksana kasus
	Fasilitas Kesehatan		
	Masih ada kesenjangan jumlah fasilitas kesehatan lanjutan dan primer antar wilayah	Masih adanya gap rasio jumlah fasilitas kesehatan dengan penduduk	Persebaran faskes primer dan lanjutan yang belum dapat diakses secara merata oleh masyarakat
	Masih belum meratanya SDM kesehatan sesuai standar	Belum terpenuhinya SDM kesehatan sesuai Perencanaan kebutuhan	Proporsi dalam pemenuhan kebijakan masih belum optimal
	Belum optimalnya pelaksanaan sistem rujukan di Jawa Tengah	Kebijakan BPJS dalam rujukan berjenjang dan kompetensi SDM RS	Belum meratanya ketersediaan dokter spesialis dan subspesialis
			Belum semua fasyankes memiliki layanan *fast track* untuk lansia dan kelompok rentan
	Status Gizi		
	Masih adanya beban ganda masalah kelebihan dan kekurangan gizi	Pengetahuan dan perilaku pemenuhan kebutuhan gizi	Keterbatasan masyarakat dalam akses informasi terkait gizi seimbang
			Tingginya kasus Anemia pada remaja putri
		Masih ditemukannya penyakit infeksi pada anak (TB, Diare, kecacingan, ISPA)	Kurangnya literasi masyarakat dalam pengetahuan kesehatan
	Ketahanan pangan pada keluarga masih menjadi faktor determinan yang mempengaruhi status gizi masyarakat	Belum meratanya akses makanan bergizi	Produksi, distribusi dan ketersediaan pangan
2	**RSUD dr. MOEWARDI**		
	Mutu pelayanan belum optimal	implementasi pelayanan yang berorientasi pada mutu, keselamatan pasien & patient experience belum optimal	1. Ketersediaan sarana prasarana & alat kedokteran belum sesuai standar RS rujukan tersier
			2. sebagian SDM yang ada belum memiliki kompetensi yang diharapkan
			3. layanan RS belum seluruhnya terintegrasi dengan teknologi informasi
			4. Strategi hospital marketing (promkes) belum dapat dikembangkan secara efektif

No	Masalah Pokok (Tujuan dan sasaran)	Masalah (Strategi)	Akar Masalah (Program Kegiatan)
			5. tata kelola manajemen RS belum optimal menghasilkan proses bisnis yang efektif efisien
3	**RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO**		
	Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan	Tingginya Angka kematian > 48 jam (Net Death Rate RSUD Prof Dr Margono Soekarjo.	a. Kebijakan moratorium nasional yang menyebabkan kesulitan dalam penambahan dan pemenuhan tenaga kesehatan
			b. Keterbatasan sarana dan prasarana rumah sakit tyang belum sesuai dengan standar kompetensi layanan
			c. Kurangnya pemanfaatan teknologi kedokteran canggih untuk ketepatan diagnosa dan terapi.
	Belum optimalnya kualitas tata kelola RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Masih kurangnya pemanfaatan penyebaran media informasi oleh masyarakat.
		Kualitas pengelolaan resiko belum optimal	Kurangnya pengelolaan risiko yang terstruktur dan terintegrasi.
4	**RSUD dr. ADHYATMA**		
	Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan	1. Angka NDR di RSUD dr. Adhyatma, MPH masih cukup tinggi	a. Masih terdapat kekurangan dan ketidaklengkapan alat kesehatan / kedokteran dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan
			b. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan
			c. Pemetaan SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan belum optimal
			d. Masih kurangnya pemerataan dan pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten dan tersertifikasi
			e. Pelayanan kesehatan belum merata ke seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin dan daerah terpencil
	Belum optimalnya kualitas tata kelola	1. Terdapat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Terdapat ketidakselarasan antara pelayanan administratif

No	Masalah Pokok (Tujuan dan sasaran)	Masalah (Strategi)	Akar Masalah (Program Kegiatan)
	RSUD dr. Adhyatma, MPH		dengan pelayanan kesehatan kepada pasien
		2. Kualitas pengelolaan risiko belum optimal	a. sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja
			b. Hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan belum dianalisis secara mendalam sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya
5	**RSUD dr. REHATTA**		
	Kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit belum optimal	1. Belum optimalnya pelayanan berfokus pada pasien	a. Keterbatasan ketersediaan SDM Kesehatan utamanya dokter spesialis
			b. Kurangnya pemenuhan alat kesehatan dan sarana pendukung kesehatan sesuai milestone pengembangan pelayanan RS
			c. Keterbatasan pengembangan kompetensi SDM
	Tata kelola Rumah Sakit belum efektif	1. Belum terjadi kolaborasi multi stakeholder dalam implementasi proses bisnis RS	a. Kurangnya komitmen dan kapasitas aksi bersama antar stakeholder internal RS dalam implementasi proses bisnis RS
			b. Keterbatasan otomatisasi digital dalam pelayanan front office dan back office RS
			c. Belum optimalnya PKRS dalam pengembangan pelayanan RS
			d. Keterbatasan akses pasien BPJS implikasi kebijakan dan birokrasi Pemerintah Kabupaten
6	**RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO**		
	Belum optimalnya kualitas pelayanan rumah sakit	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana	Fasilitas pelayanan, sarana, dan prasarana (meliputi alat kesehatan dan bangunan) yang sesuai standar belum sepenuhnya tersedia.
			Dukungan sistem informasi terintegrasi terhadap keseluruhan kinerja masih belum optimal.

No	Masalah Pokok (Tujuan dan sasaran)	Masalah (Strategi)	Akar Masalah (Program Kegiatan)
		Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Kesehatan	Peningkatan kompetensi SDM belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditentukan.
			Belum terpenuhinya kebutuhan dokter sub spesialis psikiatri (anak dan remaja, adiksi, forensik, geriatri) dan sub spesialis non psikiatri.
		Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kesehatan masih perlu ditingkatkan.	Upaya promosi kesehatan untuk menurunkan stigma terhadap pasien jiwa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan ODGJ masih memerlukan penguatan.
	Belum optimalnya reformasi birokrasi	Kualitas pengelolaan risiko belum optimal	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan perencanaan dan evaluasi belum tercapai secara maksimal.
			Penyusunan analisis risiko secara akurat masih belum tercapai.
		Kualitas pelayanan dari perangkat daerah belum mencapai tingkat yang diharapkan.	Penyebaran informasi tentang layanan rumah sakit di masyarakat masih perlu ditingkatkan.
			Pembiayaan operasional rumah sakit belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan.
7	**RSJD dr. ARIF ZAINUDIN**		
			Penyampaian informasi dan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat belum mencapai sasaran secara optimal.
	Kualitas Pelayanan Kesehatan belum optimal	Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal RS	Kurangnya ketersediaan dokter spesialis sesuai standar
			Kualitas tenaga kesehatan belum memadai
			Belum optimalnya pengembangan kompetensi Nakes
			Belum lengkapnya ketersediaan sarana prasarana RS

No	Masalah Pokok (Tujuan dan sasaran)	Masalah (Strategi)	Akar Masalah (Program Kegiatan)
		Belum tercapainya target pendapatan	Masih rendahnya pengawasan keuangan BLUD RS
			Perubahan regulasi klaim oleh BPJS
			Angka kunjungan pasien baik psikiatri maupun non psikiatri belum meningkat secara signifikan
		Belum optimalnya sistem informasi	Sistem informasi belum terintegrasi secara menyeluruh
			Sistem informasi terganggu/ lambat/ susah diakses
		Rendahnya mutu layanan kesehatan jiwa yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien	Kurangnya dokter spesialis / sub spesialis psikiatri dan non psikiatri untuk pelayanan di RS
			Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM)
			Tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat yang masih rendah
		Belum terbangunnya jejaring pada aspek pelayanan, pendidikan dan penelitian dan jejaring kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Masih kurangnya mitra jejaring untuk pelayanan, penelitian dan publikasi
			Tidak optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor
			Tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat yang masih rendah
		Kompetensi SDM yang belum profesional	Terbatasnya pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi
			Terbatasnya jumlah riset dan penelitian
		Sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar	Pemeliharaan dan kalibrasi sarana dan prasarana yang belum optimal
			Penggunaan alkes yang kurang efektif dan efisien
			Pengusulan Perencanaan SPA kurang tepat
			Pengadaan tidak sesuai kebutuhan
			Alokasi anggaran SPA kurang memadai
		Ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit	Masih lamanya waktu tunggu pelayanan

No	Masalah Pokok (Tujuan dan sasaran)	Masalah (Strategi)	Akar Masalah (Program Kegiatan)
			Pelanggan belum memahami mekanisme dan prosedur pelayanan
			Kurangnya petunjuk /alur pelayanan yang cepat
		Belum terciptanya sosial marketing produk unggulan	Sosialisasi produk unggulan kurang tepat sasaran
			Stigmatisasi masyarakat pada institusi pelayanan /RS Jiwa
		Transformasi layanan digital kurang optimal dan belum terintegrasi	Kesulitan mengakses layanan melalui aplikasi baik internal maupun eksternal
			Aplikasi yang terintegrasi belum terbangun
			Kurang update nya informasi yang diberikan
		Tata kelola RS yang kurang baik	Belum optimalnya sistem reward and punishment
			Belum tercapainya target kinerja rumah sakit
		Efisiensi anggaran dan peningkatan pendapatan/pertumbuhan revenue belum terwujud	Pendapatan rumah sakit tidak tercapai
			Belanja tidak efisien
			Administrasi/prosedur pembayaran yang berbelit belit
			Penatalaksanaan tagihan pelayanan belum optimal
			Akurasi perhitungan biaya unit cost masih rendah
8	**RSJD dr. RM. SOEDJARWADI**		
	Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat	Upaya peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi belum optimal	Belum optimalnya mutu layanan klinis
			Peningkatan sarana prasarana belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan
			Belum semua kebutuhan tenaga kesehatan terpenuhi, kuantitas dan kualitas
			Masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran terkait upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, utamanya kesehatan jiwa
		Belum optimalnya tata kelola Rumah Sakit	Penataan sistem manajemen rumah sakit belum

No	Masalah Pokok (Tujuan dan sasaran)	Masalah (Strategi)	Akar Masalah (Program Kegiatan)
			sepenuhnya terintegrasi dan handal
			Penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya optimal
9	**RSMD SOEPARDJO ROESTAM**		
	Belum optimalnya pengembangan kompetensi rumah sakit sesuai sistem rujukan.	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar rumah sakit khusus.	Jumlah SDM Kesehatan yang ada belum sesuai standar.
		Belum optimalnya kompetensi SDM Kesehatan sesuai standar rumah sakit khusus.	Sebagian SDM Kesehatan yang ada belum memiliki kompetensi yang sesuai standar.
		Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar.	Ketersediaan sarana dan prasarana dan alat kedokteran belum sesuai standar rumah sakit.
			Pemeliharaan dan kalibrasi sarana dan prasarana yang belum optimal
		Belum optimalnya tata kelola rumah sakit.	Tata kelola manajemen RS belum optimal menghasilkan proses bisnis yang efektif efisien
			Penataan sistem manajemen rumah sakit belum sepenuhnya terintegrasi dan handal
			Penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya optimal
		Belum terbangunnya jejaring pada aspek pelayanan, pendidikan dan penelitian serta jejaring kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Masih kurangnya mitra jejaring untuk pelayanan, penelitian dan publikasi.
			Tidak optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor
			Tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat yang masih rendah

Analisis USG

Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) dalam dokumen Rencana Strategis ini disusun untuk mengidentifikasi dan memetakan masalah-masalah prioritas yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan

kesehatan. Proses ini menilai setiap isu berdasarkan tiga kriteria utama: urgensi (tingkat keterdesakan penanganan masalah), keseriusan (dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat), dan potensi pertumbuhan (kemungkinan masalah memburuk jika tidak ditangani).

Berdasarkan hasil analisis, isu-isu yang menempati skor tertinggi antara lain tingginya penularan kasus dan keterlambatan penemuan, belum optimalnya tatalaksana sesuai standar, serta masih terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan keracunan makanan. Masalah keterbatasan sumber daya skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) dan kesehatan jiwa, rendahnya ketepatan pencatatan pelaporan, dan belum optimalnya dukungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) juga menjadi perhatian. Di sisi pelayanan, isu persebaran faskes dan tenaga spesialis yang belum merata serta tantangan pelaksanaan AMPSR juga muncul sebagai masalah strategis. Sedangkan rendahnya literasi masyarakat dalam gizi seimbang dan kesehatan umum menjadi hambatan dalam upaya promotif dan preventif. Tabel menyajikan pemetaan skoring USG terhadap akar masalah Kesehatan di Jawa Tengah sebagaimana berikut:

Tabel 2.11
Pemetaan Skoring USG Terhadap Akar Masalah Kesehatan

No	Masalah/Isu	kriteria			Skor	Prioritas
		Urgency	*seriousnes s*	*growth*		
	Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular					
	Tingginya penularan kasus dan penemuan yang terlambat	5	5	5	15	1
	Tatalaksana kasus yang ditemukan belum sesuai standar	4	4	5	13	3
	Belum optimalnya komitmen kapasitas aksi bersama antar stake holder dalam tatalaksana kasus	4	4	4	12	4
	Masih adanya KLB/wabah, keracunan makanan	5	5	4	14	2
	Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penemuan kasus	4	4	3	11	5
	Terbatasnya sumber daya skrining PTM dan kesehatan jiwa	4	3	3	10	6
	Masih rendahnya ketepatan dan kelengkapan pencatatan pelaporan	3	3	3	9	7
	Belum optimalnya dukungan sosial terhadap ODGJ pasca perawatan	4	3	3	10	6
	Kasus Kematian Ibu dan Balita					

No	Masalah/Isu	kriteria			Skor	Prioritas
		Urgency	*seriousness*	*growth*		
	Tatalaksana belum dilaksanakan sesuai standar	5	5	5	15	1
	Adanya perubahan kebijakan dalam pelaksanaan AMPSR di fasilitas kesehatan (SOP, kemampuan dan kompetensi Nakes)	5	5	4	14	2
	Masih terbatasnya jumlah SDM kesehatan di kab/kota dalam pendampingan AMPSR	5	4	4	13	3
	Belum optimalnya komitmen kapasitas aksi bersama antar stake holder dalam tatalaksana kasus	4	4	4	12	4
	Fasilitas Kesehatan					
	Persebaran faskes primer dan lanjutan yang belum dapat diakses secara merata oleh masyarakat	4	4	4	12	2
	Proporsi dalam pemenuhan kebijakan masih belum optimal	4	4	3	11	3
	Belum meratanya ketersediaan dokter spesialis dan subspesialis	4	5	5	14	1
	Status Gizi					
	Keterbatasan masyarakat dalam akses informasi terkait gizi seimbang	5	5	5	15	1
	Kurangnya literasi masyarakat dalam pengetahuan kesehatan	4	5	5	14	2
	Produksi, distribusi dan ketersediaan pangan	4	4	5	13	3

Hasil analisis USG memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat urgensi dan dampak dari berbagai isu strategis kesehatan. Isu dengan skor tertinggi, seperti penularan kasus yang tinggi, keterlambatan penemuan kasus, dan belum optimalnya tatalaksana sesuai standar, menunjukkan adanya tantangan besar dalam sistem surveilans dan tata kelola klinis yang harus segera direspons dengan kebijakan dan program yang tepat sasaran. Demikian pula, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan dalam pelaksanaan AMPSR dan distribusi dokter spesialis, menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan perencanaan SDM kesehatan yang lebih baik.

Masalah lain seperti rendahnya keterlibatan masyarakat, literasi gizi yang masih minim, serta tantangan dalam distribusi dan ketersediaan pangan juga menandakan perlunya pendekatan lintas sektor untuk memperkuat strategi promosi kesehatan dan ketahanan pangan.

2.5. Isu Strategis Dinas Kesehatan

Isu strategis tidak selalu merupakan permasalahan perangkat daerah, namun bisa juga merupakan potensi atau tantangan yang akan dihadapi oleh perangkat daerah ke depan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis perangkat daerah memperhatikan lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang mempengaruhi perangkat daerah langsung maupun tidak langsung.

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Dalam pemberian pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah, selain faktor pendorong masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan. Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2020–2024 (Tabel 2.8) dan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maka terdapat permasalah kesehatan antara lain:

1. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi masalah yang aktual di Jawa Tengah (AKI 2024: 74,73/100.000 KH; AKB 2024: 7,57/1.000 KH). Kematian ibu di Jawa Tengah disebabkan oleh Komplikasi Non Obstetri (34,11%), Hipertensi dalam kehamilan Eklamsi (29,67%), Perdarahan dalam kehamilan (15,42%), Komplikasi Obstetri lainnya (11,21%), Infeksi yg berhubungan dengan kehamilan (5,61%), Kehamilan dengan komplikasi Abortus (0,70%), penyebab dasar yang tidak diketahui (2,34%).

   Penyebab kematian bayi antara lain gangguan pernafasan dan jantung (2024: 25,3%), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) dan prematur (2024: 21,5%), infeksi (2024: 11,1%). Status gizi buruk pada bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif. Komitmen yang dirasakan masih belum optimal dari pemangku kebijakan, pemberi pelayanan, masyarakat dan individu menjadi point penting masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Belum optimalnya upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dengan pelayanan kesehatan ibu dan bayi/anak di puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK, disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Jumlah puskesmas PONED 318 dari 881 puskesmas yang ada (36,09%), sedangkan jumlah Rumah Sakit PONEK 123 RS dari 361 RS (34,07%). Sarana pelayanan kesehatan di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar.

   Peran suami siaga dalam penurunan kasus kematian ibu perlu lebih ditingkatkan dengan keikutsertaan suami dalam kelas ibu hamil. Masih kurangnya partisipasi wanita dalam merencanakan suatu persalinan dan mengambil keputusan (memutuskan siapa penolong persalinan, dimana

tempat melahirkan, alat kontrasepsi yang akan digunakan pasca melahirkan), yang menjadi otoritas suami. Masih adanya *gender stereotype* (laki-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan) dan anggapan masyarakat bahwa masalah kehamilan dan persalinan menjadi urusan wanita dan merupakan hal yang biasa. Perlu dukungan dan perhatian suami terhadap kehamilan dan persalinan seorang istri. Meskipun indeks ketimpangan gender semakin kecil namun pembangunan pada dimensi kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak masih terdapat kesenjangan terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan terhadap sektor kesehatan dibanding laki-laki.

2. Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular masih menjadi permasalahan di Jawa Tengah. TBC merupakan penyakit menular langsung yang dapat mengancam kesehatan masyarakat serta beresiko tinggi jika tidak ditangani secara cepat. Namun TBC dapat dicegah dan disembuhkan jika pengetahuan, deteksi dini, dan pengobatan dilakukan secara tepat. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk melakukan percepatan eliminasi TBC dan menurunkan insiden serta kematian akibat TBC. HIV merupakan penyakit menular yang paling kompleks dan berdampak besar terhadap ekonomi dan sosial di masyarakat, termasuk masih tingginya stigma di masyarakat terhadap orang dengan HIV. Jika tidak diobati HIV akan berkembang menjadi AIDS dan berakibat menjadi fatal, tidak ada obat untuk menyembuhkan HIV secara total, tetapi dengan pengobatan Antiretroviral (ARV) penderita dapat hidup sehat dan produktif seumur hidup. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya dalam penanggulangan HIV melalui penemuan kasus baru, deteksi dini ibu hamil, inisiasi pengobatan ARV dengan HIV (diobati segera dihari yang sama setelah ditemukan), evaluasi pengobatan ARV untuk mengetahui virus tersupresi (tidak terdeteksi di dalam darah, penguatan jejaring dengan lintas sektor dan swasta). Di Jawa Tengah belum semua kabupaten dan kota mencapai target eliminasi kusta. Kelemahan dalam deteksi dini dan akses layanan kesehatan di beberapa wilayah yang belum merata mengakibatkan beberapa kabupaten dan kota belum mencapai target eliminasi kusta. Kusta merupakan penyakit menular kronis yang dapat disembuhkan, jika tidak diobati kusta dapat menyebabkan cacat permanen. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pencegahan kecacatan akibat kusta melalui deteksi aktif, PEP (*Post-exposure Prophylaxis*) dan keterlibatan lintas sektor. Estimasi jumlah kasus penyakit menular langsung (TB, HIV, Kusta) cukup tinggi, sedangkan penemuan kasus belum optimal. Pada Tahun 2024 Jumlah kasus TBC yang ditemukan dan diobati sebesar 87.706 kasus dari estimasi 96.917 kasus, Jumlah kasus terkonfirmasi TBC RO 1.022 kasus, TBC RO pengobatan sebesar 849 kasus. Jumlah pemeriksaan HIV dan ODHIV baru sebesar 6.509 kasus dari 949.483 pemeriksaan. Jumlah penemuan penderita baru Kusta *Pausi Basiler* (PB) 65 kasus sedangkan Kusta *Multibasiler* (MB) 1.215 kasus dengan prevalensi 6,37/10.000 penduduk. Meningkatnya kasus penyakit Tuberkulosis (TBC) Paru disebabkan antara lain keterlambatan akses

Diagnosis, (belum semua faskes mempunyai TCM dan petugas terlatih), kasus-kasus yang tidak ditemukan akan menjadi sumber penularan, rendahnya kepatuhan minum obat akan beresiko meningkatnya jumlah kasus TB *Multidrug Resistant* (MDR). Meskipun kasus HIV AIDS cenderung meningkat namun masih dibawah target penemuan, sehingga masih diperlukan upaya penemuan dan pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit, dan mengintensifkan kegiatan *Triple* Eliminasi. Kasus kusta masih ditemukan di beberapa wilayah di Jawa Tengah, baik kasus baru, kasus anak maupun kusta dengan kecacatan, sehingga masih diperlukan upaya penemuan dini dan pengendalian pengobatan. Demikian juga dengan penyakit menular langsung lainnya (Diare, ISPA, dan Hepatitis). Jumlah kasus baru penyakit bersumber binatang (tular vektor dan *zoonotik*) masih *fluktuatif*. Distribusi kasus cenderung meluas seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Jumlah *Incident Rate* (IR) DBD Tahun 2024 sebanyak 44,9/100.000 penduduk dari target ≤ 46/100.000 penduduk, *Case Fatality Rate* (CFR) DBD 1,45% dari standar nasional < 2%. Jumlah kasus baru filariasis sebanyak 15 kasus, kasus kronis filariasis sebanyak 290 kasus, terbanyak di Kabupaten Brebes.

Jawa Tengah belum mendapatkan sertifikat eliminasi malaria tingkat Provinsi dikarenakan masih ada satu Kabupaten Purworejo yang belum eliminasi dan beberapa Kabupaten termasuk ke dalam wilayah reseptif malaria. *Annual Parasite Incidence* (API) malaria 0,02/1.000 penduduk, jumlah kasus baru malaria impor sebanyak 746 kasus. Mobilitas yang cukup tinggi dari dan ke daerah endemis perlu diwaspadai termasuk di Kabupaten/ Kota yang sudah dinyatakan eliminasi. Upaya eliminasi malaria dilakukan melalui pengendalian vektor, penyelidikan epidemiologi setiap kasus yang ditemukan, dan surveilans migrasi terhadap pendatang dari daerah endemis. Leptospirosis di Jawa Tengah masih menjadi endemis di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, jumlah kasus Leptospirosis sebanyak 545 kasus, IR Leptospirosis 1,44/100.000 penduduk dari target ≤ 3/100.000 penduduk, CFR Leptospirosis 12,11%. Antraks dan rabies masih menjadi ancaman karena Jawa Tengah belum dinyatakan bebas Antraks dan rabies walaupun pada Tahun 2024 tidak ada kasus yang ditemukan.

Sejak tahun 2022, pelaksanaan transformasi kesehatan di Indonesia telah menghasilkan banyak pencapaian baik pada transformasi layanan primer maupun pada ketahanan masyarakat. Pada transformasi layanan primer telah dilaksanakan perluasan antigen imunisasi dan Indonesia memiliki komitmen dan kontribusi yang cukup kuat untuk capaian eradikasi polio global dan eliminasi campak rubella serta Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) lainnya. Hal ini tertuang dalam dokumen kebijakan dan strategi pemerintah yang menempatkan imunisasi sebagai agenda utama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit yang berpotensi untuk Kejadian Luar Biasa (KLB). Sebagai upaya perlindungan terhadap PD3I, sejak tahun 2023, terdapat 14 jenis vaksin yang wajib dipenuhi, antara lain Hepatitis, BCG, Difteri, Pertusis, Tetanus, Haemophilus influenzae type B,

Polio oral, Polio injeksi, Campak, Rubella, HPV, JE, Rotavirus dan PCV. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) diatas 100% yaitu 102%. Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain masih ada penolakan imunisasi di sebagian wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang akan mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap imunisasi, belum semua petugas imunisasi terlatih, serta kurangnya pemantauan pelayanan imunisasi di faskes swasta. Selain KLB PD3I, terjadi juga KLB Keracunan Makanan, KLB Leptospirosis di Kabupaten Demak, dan KLB Hepatitis A .

Angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes *mellitus* (DM) pada tahun 2024 berjumlah 667.145 kasus (8,66%), kardiovaskuler berjumlah 94.752 kasus (1,23%), hipertensi berjumlah 5.632.593 kasus (73,09%) dan kanker (keganasan) 3.503.167 kasus (0,045%) dan gangguan kesehatan jiwa berjumlah 98.671 kasus. Deteksi dini faktor risiko PTM, keterlibatan masyarakat dalam penanganan penyakit tidak menular belum optimal sehingga diperlukan dukungan regulasi dari *stakeholder*/pemerintah serta upaya pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3. Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana/krisis kesehatan. Upaya antisipasi (pra bencana) perlu dilakukan identifikasi wilayah risiko terdampak bencana. Pada saat bencana terjadi, dilakukan pelayanan tanggap bencana secara komprehensif dengan melibatkan lintas sektor. Oleh karena itu, sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dan SDM harus disiapkan secara optimal. Klaster kesehatan terdiri dari ketua klaster yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan klaster kesehatan baik pra, saat dan paska bencana mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Koordinator klaster bertugas membantu ketua klaster mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sekretariat bertugas Pengelolaan ketatausahaan, pengelolaan logistik kesehatan, pengembangan sistem informasi dan sarpras dan pengelolaan data, serta pengelolaan penatausahaan keuangan. Sub Klaster Pelayanan Kesehatan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan terutama pelayanan pertolongan darurat pra-fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan. Sub Klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan bertugas Melakukan pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan. Sub Klaster kesehatan reproduksi bertugas Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi. Sub klaster kesehatan jiwa bertugas Menyelenggarakan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial secara optimal. Sub klaster pelayanan gizi bertugas Menyelenggarakan pelayanan gizi. Sub klaster promosi kesehatan bertugas menyelenggarakan upaya promosi kesehatan. Sub klaster identifikasi korban mati akibat bencana (Disaster Victim Identification/DVI) bertugas Menyelenggarakan identifikasi korban meninggal dan penatalaksanaannya.

4. Masalah kekurangan gizi yang menjadi prioritas saat ini adalah malnutrisi kronis pada balita. Stunting merupakan masalah kesehatan yang menjadi prioritas di bidang kesehatan. Dengan ditetapkannya target Jawa Tengah untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 13% di tahun 2030, perlu adanya upaya lebih untuk mencapai target tersebut meskipun penurunan prevalensi stunting menurut hasil survey tahun 2024 di Jawa Tengah telah menunjukan perubahan ke arah yang lebih baik yaitu 17,1% namun masih dalam ambang batas masalah kesehatan masyarakat menurut WHO (>20%). Stunting balita di Jawa Tengah masih tinggi disebabkan oleh multifaktor seperti konsumsi gizi selama hamil, pengetahuan ibu tentang gizi, akses pelayanan yang terbatas, akses sanitasi dan kebersihan air yang kurang memadai, masalah gizi kronis, infeksi berulang, faktor sosial ekonomi, lingkungan yang saling berkaitan. Berdasarkan data dari SKI tahun 2023 prevalensi stunting 20,7% dengan kategori tinggi. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 17,1% (SSGI) dengan kategori sedang. Tren status gizi balita Jawa Tengah dengan status gizi wasting pada tahun 2023 7,1%, tahun 2024 turun menjadi 6,0%, underweight tahun 2023 14,4%, naik menjadi 15,0% pada tahun 2024, overweight tahun 2023 4,2% turun menjadi 3,2%.

   Di Jawa Tengah prevalensi stunting menurut data e-PPGBM tahun 2024 berjumlah 197.058 kasus, sehingga upaya penurunan dan pencegahan stunting perlu terus ditingkatkan melalui upaya – upaya intervensi spesifik dan sensitif di tingkat pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota hingga desa yang terlibat memiliki peran penting, serta perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi serta Pemangku Kepentingan terkait lainnya.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta. Salah satu indikator penilaian mutu fasyankes adalah dengan akreditasi baik di tatanan pelayanan kesehatan rujukan maupun di pelayanan kesehatan dasar. Tahun 2024 Puskesmas terakreditasi sudah mencapai 100% dari total 881 Puskesmas dan RS terakreditasi tercapai 96,7% dari jumlah 361 RS. Walaupun data akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan sudah cukup tinggi, namun perlu juga dikaji lebih lanjut pemenuhan standar SDM, standar pelayanan, serta standar sarana prasarana dengan tetap memprioritaskan tindakan terhadap keselamatan pasien.

   Beberapa upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasyankes baik dasar maupun rujukan serta pembiayaan jaminan kesehatan antara lain dengan peningkatan fungsi dan pemenuhan sarana prasarana, alat, SDM sesuai standar dan penjaminan kesehatan pada masyarakat miskin dan rentan seperti ibu hamil dan bayinya.

Dalam tatanan pelayanan kesehatan rujukan, untuk mendekatkan akses rujukan telah terbentuk PSC 119 di semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk pelayanan *pre hospital* yang dapat diakses oleh semua masyarakat, dan sudah ada beberapa Kab/Kota yang terintegrasi dengan *National Command Center* (NCC) 119 Kementerian Kesehatan.

Balai kesehatan masyarakat memberikan akses pelayanan rujukan UKM dan UKP di 5 UPT (Balkesmas Semarang, Balkesmas Ambarawa, Balkesmas Klaten, Balkesmas Pati, Balkesmas Magelang) yang masing-masing memiliki wilayah kerja di Jawa Tengah. Selain dukungan UPT Dinkes, RS milik Provinsi juga telah berupaya meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan melalui transformasi layanan jejaring rujukan dan digitalisasi layanan.

6. Paradigma sehat haruslah direalisasikan dalam perilaku hidup sehari hari. Paradigma sehat dilakukan dengan peningkatan upaya promotif–preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat. Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting, mengingat tidak ada satupun tindakan manusia termasuk upaya pembangunan yang tidak berhubungan dengan kesehatan. Bahkan semua kebijakan dan kegiatan pembangunan juga akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia.
7. Keberhasilan proses pembangunan daerah didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu membangun aparatur yang berkualitas, kompeten dan berkinerja baik menjadi syarat mutlak agar mampu mengimplementasikan semua bentuk cita- cita pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) diimplementasikan ke 3 bentuk yaitu: 1) Pelayanan publik; 2) Pemerintahan yang bersih dan akuntabel; 3) Kelembagaan birokrasi yang andal. Membangun *open government* melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi serta mendorong partisipasi publik termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Mendorong pengembangan ASN yang inovatif dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi. Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Program kesehatan Jawa Tengah yang perlu dituntaskan sampai dengan Tahun 2030 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Kasus kematian ibu
2. Penurunan prevalensi wasting dan stunting
3. Penurunan Angka Kesakitan dan Kematian DBD
4. Menuju Bebas Kusta 2030
5. Eliminasi kaki gajah menuju bebas Filariasis Tahun 2030

6. Bebas Malaria dengan Gebrak Malaria
7. Eliminasi TBC 2030
8. Eradikasi Polio 2026
9. Ending AIDS 2030
10. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
11. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat “Germas”
12. ODF Tahun 2026
13. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

b. Isu Strategis Lingkungan Dinamis (Isu Global, Nasional, dan Regional)

Dalam periode 2025–2029, dinamika lingkungan global, nasional, dan regional membawa tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan kesehatan. Secara global, munculnya ancaman penyakit menular baru, perubahan iklim, dan disrupsi sistem kesehatan menuntut penguatan ketahanan layanan kesehatan. Di tingkat nasional, transformasi sistem kesehatan pasca terbitnya UU No. 17 Tahun 2023, peningkatan penyakit tidak menular, dan tuntutan pencapaian SDGs mendorong pergeseran fokus ke layanan promotif-preventif yang terintegrasi dan digital. Sementara itu, di tingkat regional, permasalahan seperti disparitas akses layanan, stunting, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, serta ancaman bencana dan rendahnya literasi kesehatan masyarakat menjadi isu mendesak. Pemetaan Isu Strategis Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel 2.12.

Tabel 2.12
Pemetaan Isu Strategis Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
DINAS KESEHATAN	1. Masih adanya beban penyakit menular terabaikan dan mobilitas wilayah yang menyebabkan penyakit menular baru serta zoonosis 2. Perubahan gaya hidup yang memicu transisi epidemiologi mengarah pada peningkatan kasus tidak menular dan kesehatan jiwa 3. Masih kurangnya komitmen tenaga medis di fasyankes dalam melaksanakan penanganan	Pembangunan berkelanjutan dan kualitas lingkungan hidup di Prov Jateng	1. Sustainable Development Goals (SDG's) nomer 3 : Good health and well being 2. Perubahan iklim dan kesehatan merupakan dampak dari gelombang panas, banjir, kekeringan menyebabkan meningkatnya penyakit infeksi, gizi buruk dan kesehatan mental 3. Urbanisasi dan gaya hidup tidak sehat 4. Kesehatan mental dan beban gangguan jiwa	1. Enam pilar transformasi kesehatan : a. Transformasi layanan primer b. Transformasi layanan rujukan c. Transformasi sistem ketahanan kesehatan d. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan e. Transformasi SDM Kesehatan	Peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan melalui: a. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan b. Pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan c. Pengembangan kompetensi SDM d. Pengintegrasian sistem informasi kesehatan e. Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam	1. Rendahnya kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia 2. Rendahnya gizi masyarakat 3. Tingginya kasus penyakit dan tidak menular 4. Rendahnya kesehatan lingkungan 5. Kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan lanjutan yang berkualitas 6. Rendahnya kapasitas dan kapabilitas sistem kesehatan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	kegawatdaruratan maternal dan neonatal 4. Belum optimalnya implementasi terkait dengan rekomendasi pelaksanaan AMPSR 5. Masih ada kesenjangan jumlah fasilitas kesehatan lanjutan dan primer antar wilayah 6. Masih belum meratanya SDM kesehatan sesuai standar 7. Belum optimalnya pelaksanaan sistem rujukan di Jawa Tengah 8. Masih adanya beban ganda		5. Inovasi teknologi kesehatan 6. Resistensi antimikroba 7. Krisis kesehatan di daerah konflik	f. Transformasi teknologi kesehatan 2. Stunting dan gizi buruk 3. AKI dan AKABA 4. PM dan PTM 5. Kesenjangan akses dan mutu pelayanan kesehatan 6. Pembiayaan kesehatan	penyelenggaraan kesehatan	

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	masalah kelebihan dan kekurangan gizi 9. Ketahanan pangan pada keluarga masih menjadi faktor determinan yang mempengaruhi status gizi masyarakat					
RSUD dr. MOEWARDI	pelayanan yang berorientasi pada mutu, keselamatan pasien & patient experience belum optimal tercipta	ruang terbuka hijau yang wajib disediakan bagi RS	• Informed patients & the rise of social media • Patients exercising choice • Patient-centered medical home • Hospital as networks • Personalized medicine • Translational research & the advent	Transformasi : • Layanan Kesehatan primer • Layanan rujukan • Sistem ketahanan Kesehatan • Sistem pembiayaan Kesehatan • SDM Kesehatan • Teknologi kesehatan	• Layanan Kesehatan masyarakat rentan • Layanan intervensi spesifik keluarga risiko stunting • P2 penyakit menular & tidak menular • Fasyankes dengan layanan Kesehatan prioritas • Implementasi	• Pelayanan yang berorientasi pada mutu, keselamatan pasien & seamless experience • Sumber daya manusia yang kompeten • Penyediaan infrastruktur pelayanan yang berkualitas &

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
			of personalized medicine		germas • Ketersediaan & pemerataan SDM Kesehatan yang kompeten • Angka kesakitan & kematian • Peningkatan mutu & akses pelayanan • Peningkatan Upaya paradigma sehat • Obligasi daerah • Peningkatan mutu tata kelola pemerintahan	berkelanjutan • Pendidikan dan riset yang berorientasi pada pelayanan • Implementasi jejaring layanan • Tata kelola rumah sakit yang berkinerja tinggi, akuntabel & transparan
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO	Pelayanan yang berorientasi pada mutu keselamatan pasien belum optimal	Terciptanya Green Hospital dan penyediaan lahan terbuka hijau	Sustainable Development Goals (SDG's) nomer 3 : Good health and well being	Transformasi : • Layanan Kesehatan rujukan. • System pembiayaan Kesehatan • SDM Kesehatan • Teknologi kesehatan	• Layanan Kesehatan masyarakat koprehensif • Fasyankes dengan layanan Kesehatan prioritas • Ketersediaan & pemerataan SDM	• Pelayanan yang berorientasi pada mutu, keselamatan pasien • Sumber daya manusia yang kompeten • Penyediaan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
					Kesehatan yang kompeten • Angka kesakitan & kematian • Peningkatan mutu & akses pelayanan • Peningkatan mutu tata kelola pemerintahan	infrastruktur pelayanan yang berkualitas & berkelanjutan • Pendidikan dan riset yang berorientasi pada pelayanan • Implementasi jejaring layanan • Tata kelola rumah sakit yang berkinerja tinggi, akuntabel & transparan
					Penguatan Layanan BLUD	Ketersediaan dan pemetaan SDM Kesehatan untuk pemenuhan layanan sesuai kompetensi.
RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan berorientasi pada keselamatan pasien belum optimal	Terciptanya Green Hospital termasuk dalam hal penggunaan air, listrik, pengelolaan limbah dan penyediaan lahan terbuka hijau	Sustainable Development Goals (SDG's) nomer 3 : Good health and well being	1. Kebijakan / regulasi JKN	1. Layanan kesehatan komprehensif	1. Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan / Kedokteran Yang Sesuai Standar RS Kelas B Pendidikan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
						Dan Standar Layanan Unggulan
				2. Enam Pilar trasnformasi kesehatan Indonesia	2. Penguatan layanan BLUD	2. Ketersediaan Dan Pemerataan SDM Kesehatan Yang Kompeten
						3. Ketersediaan Anggaran Untuk Pemenuhan Kebutuhan Rumah Sakit Pendukung Pelayanan Yang Bermutu
RSUD dr. REHATTA	Belum optimalnya pelayanan berfokus pada pasien	Terciptanya Green dan Smart Hospital	1. Sustainable Development Goals (SDG's) 3 : Good health and well being	1. Fluktuasi kebijakan JKN/ BPJS	1. Integrasi pelayanan kesehatan primer dan rujukan	• Pelayanan berfokus pada pasien yang berorientasi pada mutu, keselamatan pasien
			2. Five strategies for IPHCS WHO, 2015: 1) Empowering & engaging people, 2) Strethening Governance &	2. Enam pilar transformasi kesehatan Indonesia: • Layanan Kesehatan primer • Layanan rujukan	2. Penguatan kapasitas pengelolaan BLUD	• Ketersediaan Sumber daya manusia yang kompeten

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
			accountability, 3) Reorienting Model of Care, 4) Coordinating Services, 5) Creating an Enabling Environment	• System ketahanan Kesehatan • System pembiayaan Kesehatan • SDM Kesehatan • Teknologi kesehatan		
						• Ketersediaan infrastruktur pelayanan yang berkualitas & berkelanjutan
						• Kontinyuitas pengembangan kompetensi, pendidikan dan riset yang berorientasi pada pelayanan
						• Implementasi jejaring layanan
						• Tata kelola rumah sakit yang berkinerja tinggi, akuntabel & transparan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO	pelayanan yang berorientasi pada mutu keselamatan pasien belum optimal	Terciptanya Green Hospital termasuk dalam hal penggunaan air, listrik, pengelolaan limbah dan penyediaan lahan terbuka hijau	Sustainable Development Goals (SDG's) nomer 3 : Good health and well being	Enam pilar transformasi kesehatan : 1. Transformasi layanan primer 2. Transformasi layanan rujukan 3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan 4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan 5. Transformasi SDM Kesehatan 6. Transformasi teknologi kesehatan	Peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan melalui : '- pemenuhan sarana prasarana kesehatan - pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan - pengembangan kompetensi SDM - pengintegrasian sistem informasi kesehatan - perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan	1. Belum terpenuhinya sarana prasarana yang memenuhi standar terutama alat kedokteran/alat kesehatan dan gedung pelayanan 2. Kapasitas dan kompetensi SDM Kesehatan belum optimal 3.Belum optimalnya upaya promotif dan preventif 4. Belum optimalnya pengembangan inovasi layanan rumah sakit
RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Lahan yang ada di RS belum dimanfaatkan secara optimal dalam	Konsep "Green Hospital" atau Rumah Sakit Ramah Lingkungan (RSRL) yaitu				

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	rangka mendukung Rumah Sakit Ramah Lingkungan	konsep yang menekankan efisiensi penggunaan air dan energi listrik yang efektif dan efisien, serta pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan				
	1. Tingginya angka kematian	1. Rendahnya mutu layanan fasilitas pelayanan Kesehatan 2.Rendahnya dan terbatasnya aksesibilitas layanan RS	Implementasi praktik praktik ramah lingkungan dengan penerapan green hospital	Implementasi praktik-praktik yang ramah lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan /mencegah kerusakan lungkungan serta mengurangi dampak negatif pada lingkungan	Pengelolaan lingkungan , meningkatkan infrastruktur dan sumber daya untuk mendukung praktik ramah lingkungan, penghematan energi/sumber daya	1. Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien
	2. Tingginya angka kesakitan dan kematian PM dan PTM	1. Belum optimalnya Upaya promotive dan preventif	Peningkatan kerjasama dengan rumah sakit dengan rumah sakit di luar negeri untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan berbagi pengetahuan melalui	Peningkatan kerjasama dengan rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit di provinsi lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Peningkatan kerjasama rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta untuk meningkatkan kualitas pelayanan	2. Peningkatan sarana dan prasarana yang handal dan efisien

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
			program Sister Hospital	dan berbagi pengetahuan	dan berbagi pengetahuan	
	3. Rendahnya mutu pelayanan Kesehatan	1. Belum terpenuhinya sarana prasarana dan alat Kesehatan sesuai standar 2. Inovasi layanan berbasis teknologi yang harus ditingkatkan				3. Peningkatan pemasaran produk unggulan dan peningkatan jejaring pada aspek pelayanan, Pendidikan dan pelatihan
	4. Pemenuhan SOP Fasilitas pelayanan kesehatan masih kurang	Masih adanya faslitas pelayanan primer dan rujukan serta fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya yang belum sesuai standar				4. Pengembangan inovasi dan system tekhnologi nformasi di bidang pelayanan
	5. Pelayanan Kesehatan dalam penanggulangan bencana/KLB/Krisis Kesehatan belum optimal	Pelayanan pra, saat dan pasca bencana/KLB/Krisis Kesehatan yang belum optimal				5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten dan professional
	6. Tata Kelola pemerintah yang belum akuntabel	1. Belum efektif dan efisien dalam Perencanaan dan penganggaran				6.Peningkatan Pendapatan rumah sakit dan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
		program/kegiatan 2. Penempatan ASN yang belum sesuai dengan kompetensi Pendidikan 3. Belum dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan kearsipan dan aset 4. Kualitas pengelolaan keuangan yang masih perlu ditingkatkan 5. Kualitas penatausahaan terhadap kelengkapan dokumen,kepatuhan terhadap ketentuan - ketentuan yang berlaku perlu ditingkatkan Kualitas penatausahaan terhadap kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap ketentua ketentuan yang berlaku perlu ditingkatkan				pertumbuhan revenue
	7. Pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Kualitas pelayanan perangkat daerah belum optimal 2.				7. Peningkatan tatakelola pemerintah yang akuntabel dan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
		Kualitas pengelolaaan risiko belum optimal				pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif
RSJD dr. RM. SOEDJARWADI	Terbatasnya lahan untuk pengembangan rumah sakit	Program-program nasional yang bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan, seperti penguatan layanan rujukan atau penanganan penyakit prioritas, dapat terhambat oleh keterbatasan lahan untuk pengembangan rumah sakit yang memadai.	Secara global, terjadi tren urbanisasi yang pesat, menyebabkan kepadatan penduduk di perkotaan. Hal ini secara langsung meningkatkan permintaan akan layanan kesehatan di wilayah perkotaan, termasuk kebutuhan akan rumah sakit yang lebih banyak dan lebih besar. Keterbatasan lahan di perkotaan menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan ini.	Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan peningkatan jumlah kelas menengah meningkatkan kesadaran dan permintaan akan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini mendorong kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih banyak, termasuk rumah sakit.	Di Jawa Tengah, lahan juga dibutuhkan untuk sektor lain seperti industri, pertanian, perumahan, dan infrastruktur. Hal ini dapat semakin mempersempit ketersediaan lahan untuk pengembangan rumah sakit	Mengoptimalkan lahan yang dimiliki dengan melakukan penataan tata ruang rumah sakit serta upaya perluasan rumah sakit dengan pembelian lahan-lahan di sekitar rumah sakit.
	Belum semua kebutuhan tenaga	Pemerataan distribusi tenaga kesehatan	Prevalensi penyakit tidak menular (PTM)	Sistem perencanaan dan proyeksi	Kebutuhan akan tenaga kesehatan	Peningkatan kompetensi

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	kesehatan terpenuhi, baik secara kuantitas maupun kualitas		meningkatkan permintaan akan layanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang mencukupi dan kompeten	kebutuhan tenaga kesehatan yang akurat masih perlu diperkuat untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan.	dengan kompetensi khusus masih terbatas	spesialistik dan rekrutmen pegawai sesuai dengan pengembangan layanan yang dimiliki
	Peningkatan sarana prasarana belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan	pemerataan akses alkes ke seluruh wilayah Indonesia	Kondisi perdagangan yang tidak stabil menyebabkan berbagai kendala, termasuk dalam hal alat-alat kesehatan	Ketersediaan anggaan untuk pengadaan, pemeliharaan alkes dan sarana penunjang lainnya menjadi isu penting, terutama di tengah keterbatasan sumber daya dan efisiensi	Belum semua RS di Jawa Tengah memiliki sarpras maupun alkes yang diperlukan	Pemenuhan alat kesehatan/alat kedokteran, sarana dan prasarana penunjang pelayanan
RSMD SOEPARDJO ROESTAM	Pengembangan Kompetensi rumah sakit sesuai system rujukan	Terciptanya Green Hospital termasuk dalam hal penggunaan air, listrik, pengelolaan limbah dan penyediaan lahan terbuka hijau	Sustainable Development Goals (SDG's) nomer 3 : Good health and well being	Enam pilar transformasi kesehatan : 1. Transformasi layanan primer 2. Transformasi layanan rujukan	Peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan melalui : '- pemenuhan sarana prasarana kesehatan - pemenuhan jumlah	1. Belum terpenuhinya sarana prasarana yang memenuhi standar terutama alat kedokteran/alat kesehatan dan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
				3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan 4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan 5. Transformasi SDM Kesehatan 6. Transformasi teknologi kesehatan	dan distribusi SDM kesehatan - pengembangan kompetensi SDM - pengintegrasian sistem informasi kesehatan - perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan	gedung pelayanan 2. Kapasitas dan kompetensi SDM Kesehatan belum optimal 3.Belum optimalnya upaya promotif dan preventif 4. Belum optimalnya pengembangan inovasi layanan rumah sakit

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 didasarkan pada hasil identifikasi isu strategis dan kesepakatan forum perangkat daerah. Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dijalankan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

a. Tujuan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2025–2029 diarahkan untuk mencapai tiga fokus utama, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan,
2. Meningkatkan Status Gizi, dan
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis.

Ketiga tujuan tersebut berfungsi sebagai panduan umum untuk merespons isu-isu strategis di bidang kesehatan, termasuk aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan rujukan, prevalensi stunting dan masalah gizi, serta tata kelola birokrasi kesehatan.

b. Sasaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ditentukan beberapa sasaran daerah yang mencerminkan arah prioritas pembangunan kesehatan, yaitu:

1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak;
2. Menurunnya penyakit menular (PM) dan tidak menular (PTM);
3. Terkendalinya penyakit akibat KLB dan bencana;
4. Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar;
5. Meningkatnya jaminan pembiayaan kesehatan;
6. Menurunnya kasus stunting;
7. Meningkatnya kualitas layanan lanjutan di rumah sakit provinsi;
8. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di bidang kesehatan;
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah RSUD Dr.Moewardi, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, RSUD Dr. Adhyatma, MPH., RSUD Dr. Rehatta, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, RSJD Dr. Arif Zainudin, RSJD Dr. RM Soedjarwadi, RSMD Soepardjo Roestam;
11. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah RSUD Dr.Moewardi, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, RSUD Dr. Adhyatma, MPH., RSUD Dr. Rehatta, RSJD Dr. Amino Gondohutomo,

RSJD Dr. Arif Zainudin, RSJD Dr. RM Soedjarwadi, RSMD Soepardjo Roestam.

Pencapaian sasaran ini akan diukur melalui berbagai indikator, seperti persentase penurunan kasus stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKABA), proporsi penduduk bebas penyakit menular dan tidak menular, proporsi fasilitas kesehatan sesuai standar, cakupan JKN, serta keberhasilan pelaksanaan surveilans kesehatan.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan sesuai dengan cascading yang disusun ke dalam tabel berikut:

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	*BASELINE* TAHUN		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Kualitas Kesehatan		Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,59	74,93	75,24	75,46	75,68	75,90	76,12	76,50	76,50
		Meningkatnya Kesehatan Ibu Anak	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	76,40	74,70	79,31	78,27	77,21	76,32	75,60	74,87	74,87
			Angka Kematian Balita (AKABA)	Angka	9,28	8,57	8,75	8,66	8,57	8,48	8,40	8,32	8,32
		Meningkatnya Penemuan, Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Menular (PM) Dan Tidak Menular (PTM)	Angka populasi bebas penyakit menular (PM)	%	0	22,80	28,50	34,30	40	45,70	51,40	57,10	57,10
			Angka populasi bebas penyakit tidak menular (PTM)	%	0	0	50	52	54	56	58	60	60
		Meningkatnya Pelayanan	Presentase kabupaten/kota yang	%	0	0	71	77	82	88	94	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	*BASELINE* TAHUN		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian KLB Dan Bencana	melaksanakan surveilans kesehatan dan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian KLB, bencana, dan kesehatan lingkungan										
		Meningkatnya Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	0	22,86	28,57	34,28	40	45,71	51,43	51,43
		Meningkatnya Jaminan Pembiayaan Kesehatan	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	94,54	98,83	99,03	99,23	99,43	99,63	99,83	99,90	99,90
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr Moewardi	NDR (Net Death Rate) RSUD Dr Moewardi	Permil	0	46,17	56	55,80	55,60	55,50	55,30	55,10	55,10
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Prof Margono Soekarjo	NDR (Net Death Rate) RSUD Prof Margono Soekarjo	Permil	0	30,14	30,135	30,13	30,125	30,12	30,115	30,11	30,11

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	*BASELINE* TAHUN		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr Adhyatma, MPH	NDR (Net Death Rate) RSUD Dr Adhyatma	Permil	0	33,34	33,20	33,10	33	32,90	32,80	32,70	32,70
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Rehatta	NDR (Net Death Rate) RSUD Dr. Rehatta	Permil	0	11	10,90	10,80	10,70	10,60	10,50	10,40	10,40
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSJD Dr Amino Gondohutomo	NDR (Net Death Rate) RSJD Dr Amino Gondohutomo	Permil	0	4,07	4,06	4,02	3,98	3,96	3,92	3,90	3,90
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr Arif Zainudin	NDR (Net Death Rate) RSUD Dr Arif Zainudin	Permil	0	3,09	3,05	2,98	2,96	2,94	2,92	2,90	2,90
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSJD DR. RM SOEDJARWADI	NDR (Net Death Rate) RSJD DR. RM SOEDJARWADI	Permil	11,86	13,19	13,10	13,05	13	12,95	12,90	12,85	12,85

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	*BASELINE* TAHUN		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di RS Mata Soeparjo Rustam	NDR RS Mata Soepardjo Rustam	Permil	0	33,34	33,20	33,10	33	32,90	32,80	32,70	32,70
2	Meningkatkan Status Gizi		Prevalensi Stunting	%	20,70	17,10	17	17	16	15	13,60	13	13
		Meningkatkan Pencegahan Stunting	Persentase Penurunan Kasus Stunting	%	1,81	0,22	0,15	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,35

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	angka	92,19	79,81	84,43	84,50	85	85,50	86	86,50	86,50
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	angka	87,50	90	90,25	90,50	90,75	91	91,25	91,50	91,50
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	angka	2,75	2,87	2,87	2,88	2,89	2,90	2,91	2,92	2,92
		Meningkatnya	Indeks	Angka	0	90	91	91,02	91,03	91,04	91,05	91,06	91,06

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Dr. Moewardi	Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah RSUD Dr. Moewardi										
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah RSUD Dr. Moewardi	Indeks Manajemen Risiko RSUD Dr. Moewardi	Angka	0	2,90	2,95	3	3	3,05	3,05	3,10	3,10
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Angka	0	86	86,50	86,75	87	87,25	87,50	87,75	87,75

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Indeks Manajemen Risiko RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Angka	0	3,12	3,13	3,13	3,14	3,15	3,16	3,16	3,16
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Dr. Adhyatma, MPH	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah RSUD Dr. Adhyatma, MPH	Angka	94,08	94,08	94,08	94,08	94,08	94,08	94,08	94,08	94,08
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah RSUD	Indeks Manajemen Risiko RSUD Dr. Adhyatma, MPH	Angka	0	2,90	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,05

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Dr. Adhyatma, MPH											
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Dr. Rehatta	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah RSUD Dr. Rehatta	Angka	78,22	85,20	90	90,01	90,02	90,03	90,04	90,05	90,05
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah RSUD Dr. Rehatta	Indeks Manajemen Risiko RSUD Dr. Rehatta	Angka	0	3,08	3,09	3,10	3,11	3,12	3,13	3,14	3,14
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah RSJD Dr Amino	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah RSJD Dr Amino	Angka	0	92,75	92,75	92,76	92,77	92,78	92,79	92,80	92,80

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Gondohutomo	Gondohutomo										
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah RSJD Dr Amino Gondohutomo	Indeks Manajemen Risiko RSJD Dr Amino Gondohutomo	Angka	0	2,693	2,75	2,76	2,77	2,78	2,79	2,80	2,80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah RSJD Dr Arif Zainudin	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah RSJD Dr Arif Zainudin	Angka	89,58	90,72	90,75	90,85	91	91,10	91,25	91,3	91,3
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko	Indeks Manajemen Risiko RSJD Dr Arif	Angka	0	2,96	2,97	3	3,05	3,07	3,09	3,1	3,1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Perangkat Daerah RSJD Dr Arif Zainudin	Zainudin										
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah RSJD Dr RM Soedjarwadi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah RSJD Dr RM Soedjarwadi	Angka	87,11	90,234	91	91,1	91,2	91,3	91,4	91,5	91,5
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah RSJD Dr RM Soedjarwadi	Indeks Manajemen Risiko RSJD Dr RM Soedjarwadi	Angka	2,825	3,065	2,95	3	3,10	3,11	3,12	3,13	3,13
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	0	0	85	85,5	86	86,50	87	88,50	88,50

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Perangkat Daerah RS Mata Soeparjo Rustam	Perangkat Daerah RS Mata Soeparjo Rustam										
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah RS Mata Soeparjo Rustam	Indeks Manajemen Risiko RS Mata Soeparjo Rustam	Angka	0	0	2,70	2,75	2,80	2,85	2,90	3	3

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi pembangunan kesehatan disusun untuk memastikan tercapainya sasaran daerah dengan efektif dan efisien. Strategi-strategi yang akan diimplementasikan antara lain:

TABEL 3.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas kesehatan	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan kesehatan ibu, bayi, balita, anak dan remaja melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi sdm, penyusunan regulasi, perbaikan baseline data dan pemenuhan SOP.	Peningkatan kompetensi SDMKes
			Pemenuhan sarpras PONED dan PONEK
			Penguatan tatakelola PONED dan PONEK
			Penguatan Pelayanan kegawatdaruratan
		Pengembangan Inovasi dan Digitalisasi dalam rangka Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Pemanfaatan teknologi informasi kesehatan dalam pencatatan, pelaporan, dan sistem rujukan online untuk mempercepat akses dan koordinasi pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi.
		Peningkatan pelayanan PONEK dan PONED	Penguatan jejaring rujukan maternal dan neonatal Penguatan sistem monitoring dan evaluasi mutu layanan PONED dan PONEK Kolaborasi lintas sektor dan Kemitraan dengan masyarakat
	Menurunnya Penyakit Menular (PM) dan Tidak Menular (PTM)	Penguatan jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit	Pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kab/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko
			Pelaksanaan skrining/cek kesehatan gratis
			Peningkatan cakupan imunisasi
			Pemenuhan sumber daya untuk mendukung deteksi dini/skrining tatalaksana
			Peningkatan kualitas data dan informasi
			Penguatan kolaborasi antar stake holder melalui kegiatan lintas sektor

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan dukungan keluarga pasien
			Surveilans berbasis masyarakat (SBM)
		Peningkatan deteksi & respon cepat potensi KLB (kejadian luar biasa)/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi klb/wabah	Setiap kasus penyakit menular berpotensi KLB dilakukan investigasi kasus / Penyelidikan Epidemiologi 1x 24 jam
			Setiap Kejadian Luar Biasa / Peningkatan kasus penyakit berpotensi KLB dilakukan upaya penanggulangan KLB.
		Peningkatan Kualitas Surveilans Penyakit Menular dan Tidak Menular penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan	Validasi data surveilans kasus dan surveilans faktor risiko secara rutin
			Surveilans kualitas lingkungan melalui Uji kualitas lingkungan secara berkala
			Kajian hasil surveilans kasus penyakit dan faktor risiko
		Deteksi dini dan pengendalian fakto risiko penyakit menular dan tidak menular dan serta pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan	Surveilans migrasi / deteksi dini / skrining /kontak erat dengan kasus
			Deteksi dini Penyakit tidak menular dengan memanfaatkan kelembagaan yang sudah ada (posbindu , ILP , CKG ,dll)
			Pemetaan faktor risiko lingkungan
			Analisis faktor risiko lingkungan beserta rekomendasi perbaikan kualitas lingkungan
	Terkendalinya Penyakit Akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	Meningkatkan Respon terhadap Dampak Krisis Kesehatan akibat Bencana atau Berpotensi Bencana Skala Prioritas melalui Penguatan Komitmen Daerah, Penguatan Surveilans Berbasis Laboratorium dan Jejaring Layanan serta Mempertahankan Respon Cepat KLB/Bencana, Penguatan Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Dampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana.	Respon cepat penanggulangan krisis kesehatan dan KLB < 24 jam
			Peningkatan komitmen dan penguatan kolaborasi antar stake holder
			Pembentukan dan Implementasi Desa/Kelurahan Sehat Iklim (Deksi)
			Pencegahan dan Mitigasi KLB/Bencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kapasitas SDM, kesiapan pemenuhan logistik, obat, penguatan manajemen penanggulangan bencana.	Penguatan pengembangan kompetensi SDM
	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan bermutu melalui Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat untuk Layanan Prioritas Sesuai Standar dan Percepatan Implementasi Digitalisasi Layanan Kesehatan	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan
			Percepatan digitalisasi layanan kesehatan
			Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sarana Prasarana Alat sesuai standar
			Perluasan cakupan layanan
		Peningkatan dan Optimalisasi Peran UPT dalam Mendukung Program Prioritas di Wilayah Kerja	
		Pemetaan Kemampuan Fasyankes, Sarana Prasarana dan Alat, SDM, untuk Pemberian Layanan Prioritas Sesuai Standar.	Pemetaan kompetensi SDM dan pemenuhan SPA kesehatan dalam pemberian layanan prioritas secara periodik.
	Meningkatnya jaminan pembiayaan kesehatan	Memperluas Cakupan Kesehatan Semesta melalui Identifikasi Strategi untuk Percepatan UHC di Kabupaten/Kota	Pemetaan sasaran untuk pembiayaan jaminan kesehatan
			Peningkatan kepesertaan aktif
			Peningakatan cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan	Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana alat kedokteran sesuai kompetensi dan unggulan pelayanan lanjutan
			Pemenuhan dokter spesialis dan subspesialis
			Peningkatan kompetensi named nakes
			Pengintegrasian layanan dengan sistem informasi
			Pengembangan inovasi dengan digitalisasi layanan
			Penguatan pelayanan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien
	Meningkatnya kualitas	Peningkatan upaya promosi & pemasaran RS	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Moewardi		
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.Moewardi	1. Peningkatan ketersediaan sarpras & alat kedokteran yang sesuai kebutuhan & standar pelayanan 2. Penguatan dukungan terhadap program nasional dan program pengarusutamaan gender
		Meningkatnya ketersediaan dan komptensi sumber daya manusia kesehatan di RSUD Dr.Moewardi	Peningkatan kapasitas Pendidikan dan pelatihan melalui sertifikasi tenaga, materi pengajaran
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSUD Dr.Moewardi	Peningkatan & pengembangan strategi promosi RS yang efektif
		Mewujudkan good gavernance dalam pelayanan di RSUD Dr.Moewardi	Penguatan pelayanan yang berorientasi pada mutu, keselamatan pasien & patient experience
			pengembangan inovasi & pusat unggulan layanan RS
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo	Pengembangan sistem informasi yang terintergrasi dengan sistem pelayanan	Penerapan Sistem Informasi Manajemen terintegrasi secara total menuju paperless
		Pengembangan pelayanan unggulan dengan pemanfaatan teknologi kedokteran	Pemanfaatan teknologi kedokteran canggih untuk ketepatan diagnose dan terapi
		Pengembangan manajemen mutu RS	Pemanfaatan media dan institusi sebagai sarana promosi
		Pengembangan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta kuantitas SDM sesuai standar profesi	Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan yang menjamin mutu RS Pendidikan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	1. Peningkatan alat kesehatan, sarana, prasarana layanan unggulan onkologi, jantung, uronefrologi, dan bedah digestif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Penguatan dukungan terhadap program nasional dan program pengarusutamaan gender
		Meningkatnya ketersediaan dan komptensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM kesehatan pendukung layanan unggulan onkologi, jantung, uronefrologi, dan bedah digestif
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Kemitraan Masyarakat
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Rehatta	Meningkatkan promosi dan advokasi masayarakat di RSUD dr. Rehatta	Peningkatan pelayanan promosi dan advokasi masyarakat yang tidak terbatas pada jam kerja ASN
		Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan di RSUD dr. Rehatta	Peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang karier dan gap kompetensi SDM
		Meningkatkan standarisasi pelayanan di RSUD dr. Rehatta	Peningkatan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Pengembangan inovasi pelayanan	Implementasi inovasi dalam tata kelola dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
		Peningkatan upaya promotif dan preventif	Pengembangan jejaring pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
		Peningkatan kualitas pelayanan melalui pemenuhan Akreditasi Rumah Sakit	Peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan sesuai standar akreditasi rumah sakit
		Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan rujukan	Peningkatan pelayanan kesehatan subspesialis psikiatri dan subspesialis non psikiatri
		Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan	Bimbingan teknis/pelatihan SDM Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pemenuhan sarana prasarana sesuai layanan unggulan	Pembangunan Blok Jiwa dan pemenuhan standar sarana, prasarana dan teknologi pelayanan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien	Pengembangan pelayanan jiwa dan pelayanan diluar kekhususannya
		Peningkatan sarana dan prasarana yang handal dan efisien	Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan dan peralatan kedokteran
		Peningkatan pemasaran produk unggulan dan peningkatan jejaring pada aspek pelayanan, pendidikan dan pelatihan	Promosi layanan dan peningkatan kerjasama dengan fasyankes lain, institusi pendidikan dan institusi terkait
		Pengembangan inovasi dan sistem teknologi informasi di bidang pelayanan	Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang mendukung pelayanan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSJD Dr. RM Soedjarwadi	Pemberdayaan Masyarakat dan Penggalangan Kemitraan Lintas Sektor dalam Upaya Promotif Kesehatan (terutama kesehatan jiwa)	Peningkatan kerjasama lintas sektoral dalam upaya promotif kesehatan (terutama kesehatan jiwa)
		Pemenuhan tenaga medis spesialistik dan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
		Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang mendukung pengampuan dan layanan unggulan	Pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan pendukung layanan kesehatan
		Peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan standar akreditasi dan inovasi berkelanjutan	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja yang berdasar pada standar akreditasi serta pengembangan inovasi yang berkelanjutan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSMD Soepardjo Roestam	Pemberdayaan Masyarakat dan Penggalangan Kemitraan Lintas Sektor dalam Upaya Promotif dan prefentif Kesehatan Mata	Peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam upaya promotif dan preventif Kesehatan Mata

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Pemenuhan tenaga medis spesialistik	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan dan Tenaga Medis Sub Spesialistik
		Pemenuhani kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang mendukung layanan unggulan	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan yang mendukung layanan unggulan.
		Peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan standar akreditasi dan inovasi berkelanjutan	Pemenuhan persyaratan akreditasi dan inovasi berkelanjutan.
Meningkatkan status gizi	Menurunnya kasus stunting	Pencegahan dan Penanggulangan masalah gizi.	Peningkatan literasi gizi
			Peningkatan ketrampilan kader
			Pemberian suplemen gizi dan PMT
			Penanganan masalah gizi di faskes
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan pelayanan publik	Penguatan sistem manajemen risiko dan akuntabilitas kelembagaan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Meningkatkan good governance	Implementasi prinsip good governance dan pengendalian internal
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di RSUD Dr. Moewardi	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan daerah	Pemantapan tata kelola organisasi yang baik
			Pemantapan kinerja tatakelola keuangan yang akuntabel menuju kemandirian RS
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah RSUD Dr. Moewardi	Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan budaya sadar risiko unit kerja
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo	Pengembangan Sarpras RS sesuai standar RS Klas A dan pengembangan manajemen organisasi yang berbasis SIMRS	Penyediaan Sarpras RS yang unggul aman dan efisien

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan perkantoran, kepegawaian dan keuangan, administrasi pelayanan	Penyediaan Sarpras RS yang unggul aman dan efisien dengan peningkatan komitmen dalam pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo	Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan internalisasi manajemen risiko dalam kegiatan perangkat daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah RSUD dr. Adhyatma, MPH	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan daerah di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Peningkatan kualitas pelayanan dengan pemenuhan kebutuhan perkantoran, administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan yang efektif dan efisien
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah RSUD dr. Adhyatma, MPH	Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan evaluasi di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko dengan perencanaan dan evaluasi yang efektif
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah RSUD dr. Rehatta	Meningkatkan pelayanan publik di RSUD Dr. Rehatta	Peningkatan integrasi pelayanan yang efektif di RSUD dr. Rehatta
			Peningkatan komitmen melayani dalam pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah RSUD dr. Rehatta	Meningkatkan good governance di RSUD dr. Rehatta	Peningkatan internalisasi manajemen risiko dalam kegiatan perangkat daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Meningkatkan pelayanan publik di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Optimalisasi penerimaan pendapatan BLUD Efisiensi belanja operasional BLUD
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Meningkatkan good governance di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah
	Meningkatnya kualitas		Pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pelayanan perangkat daerah RSJD Dr. Arif Zainudin	Meningkatkan pelayanan publik di RSJD Dr. Arif Zainudin	Penerapan system Pembayaran yang baik
			Pengembangan system informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah RSJD Dr. Arif Zainudin	Meningkatkan good governance di RSJD Dr. Arif Zainudin	Pengembangan pelayanan dan system manajemen rumah sakit berbasis teknologi informatika
			Pengelolaan risiko yang optimal
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Meningkatkan pelayanan publik di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Penegakan integritas dan internalisasi core value ASN (berakhlak) secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan good and clean governance
			Integrasi sistem digitalisasi pelayanan dan administrasi serta upaya mempermudah akses layanan dan meningkatkan transparansi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Meningkatkan good governance di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Mengoptimalkan proses manajemen risiko yang menjangkau sampai unit kerja terkecil
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah RSMD Soepardjo Roestam	Meningkatkan pelayanan publik di RSMD Soepardjo Roestam	Penguatan sistem manajemen risiko dan akuntabilitas kelembagaan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah RSMD Soepardjo Roestam	Meningkatkan good governance di RSMD Soepardjo Roestam	Implementasi prinsip good governance dan pengendalian internal

Tabel 3.3

Pentahapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
3. Pemetaan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah 4. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana di pelayanan kesehatan primer dan lanjutan; 5. Penyusunan Kebijakan terkait dengan rencana pemenuhan SDM Kesehatan;	1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah; 2. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana di pelayanan kesehatan primer dan lanjutan; 3. Pengembangan program pemerataan SDM kesehatan;	1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah 2. Pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan lanjutan; 3. Pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi 4. Pengembangan Ketrampilan Kader Kesehatan	1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah; 2. Pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan lanjutan; 3. Pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi dengan model pengampuan; 4. Pengembangan Ketrampilan Kader Kesehatan 5. Peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta;	1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah 2. Pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan lanjutan; 3. Pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi dengan model pengampuan; 4. Pengembangan Ketrampilan Kader Kesehatan 5. Peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta	1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah 2. Pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan lanjutan; 3. Pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi dengan model pengampuan; 4. Pengembangan Ketrampilan Kader Kesehatan 5. Peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta;

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
6. Penyusunan Kebijakan terkait dengan rencana pemenuhan Kader Kesehatan 7. Pemetaan dan pemberian jaminan pembiayaan kesehatan; 8. Identifikasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi; 9. Pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota	4. Pengembangan ketrampilan Kader Kesehatan 5. Peningkatan kepesertaan aktif untuk JKN 6. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi; 7. Pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;	5. Peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta 6. Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi; 7. Pemerataan sumberdaya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan 8. Peningkatan dan penguatan	6. Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Infromasi Kesehatan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi 7. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan; 8. Peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan 9. Penguatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional	6. Pengembangan dan Pemanfataan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi; 7. Peningkatan Kapasitas sumberdaya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan; 8. Peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan 9. Penguatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional	6. Pengembangan dan Pemanfataan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi 7. Peningkatan Kapasitas sumberdaya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan; 8. Peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan 9. Penguatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
serta inisiasi penyelesaian faktor risiko 10. Pemenuhan literasi masyarakat dibidang kesehatan 11. Peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional	8. Peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan; 9. Peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional	literasi masyarakat dibidang kesehatan; 9. Peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional			
RSUD Dr. Moewardi					
Cancer Advance					
Memperkuat pondasi strata utama	Memperkuat pondasi strata utama	mengembangkan layanan kedokteran nuklir dan advance radio terapi	advance oncology	terapi komprehensif & mutakhir	center of excellent cancer care (pusat layanan cancer excel)
Klinis					

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
revitalisasi tumor board	Inisiasi pembentukan KSM onkologi, tumor board sudah aktif	Monitoring tumor board	monitoring tumor board	monitoring tumor board	monitoring tumor board
memperkuat pelayanan onkologi, terapi sistemik & radioteraphy	pemantapan pelayanan onkologi, terapi sistemik & radioteraphy	monitoring pelayanan onkologi, terapi sistemik & radioteraphy	monitoring pelayanan onkologi, terapi sistemik, radioteraphy, kedokteran nuklir & robotic surgery	monitoring pelayanan onkologi, terapi sistemik, radioteraphy, kedokteran nuklir & robotic surgery	monitoring pelayanan onkologi, terapi sistemik, radioteraphy, kedokteran nuklir, robotic surgery & terapi komprehensif mutakhir
skrining & deteksi dini	skrining & deteksi dini	skrining & deteksi dini	skrining & deteksi dini	skrining & deteksi dini	skrining & deteksi dini
penyelesaian perijinan layanan kedokteran nuklir	penyelesaian perijinan layanan kedokteran nuklir	izin layanan kedokteran nuklir telah tersedia	monitoring layanan paliative & homecare	monitoring layanan paliative & homecare	monitoring layanan paliative & homecare
	revitalisasi layanan paliative & home care	layanan paliative & home care sudah aktif	persiapan tata kelola komprehensif & mutakhir	layanan terapi target obat spesifik	monitoring layanan terapi target obat spesifik
	persiapan tata kelola layanan kedokteran nuklir	persiapan tata kelola layanan robotic surgery	Monitoring pelaksanaan register kanker	Pemeriksaan genetic untuk mendeteksi mutasi gen	monitoring Pemeriksaan genetic untuk mendeteksi mutasi gen
		Monitoring pelaksanaan register kanker		layanan Konjugasi obat-antibody	monitoring layanan Konjugasi obat-antibody
				layanan Imunoterapi neoadjuvant & terapi cell	monitoring layanan Imunoterapi neoadjuvant & terapi cell
				layanan Vaksin kanker yg dipersonalisasi	monitoring layanan Vaksin kanker yg dipersonalisasi

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
				persiapan tata kelola layanan proton theraphy & transplan sumsum tulang belakang	layanan proton theraphy & transplan sumsum tulang belakang
				Monitoring pelaksanaan register kanker	Monitoring pelaksanaan register kanker
SDM					
identifikasi untuk kebutuhan layanan onkologi, kedokteran nuklir & radioteraphy	kirim sekolah : 1 org Sp.PK(K), 1 org Sp.PA(K)	kirim sekolah : 1 org Sp. THT (K), 1 org Sp.U(K)	kirim sekolah: 1 org Sp.BS N-onk (K)	kirim sekolah : 1 org Sp. B (K) onko	kirim sekolah : 1 org Sp. P (K) onko
rekrut utk layanan radioterapi : radiografer (2), fisikawan medis (1), perawat radioterapi (1),		rekrut perawat pelayanan onkologi : 2 org	rekrut perawat pelayanan onkologi : 2 org	rekrut perawat pelayanan onkologi : 2 org	
rekrut utk layanan KN : radiografer (2),farmacist (1), perawat (2), fisikawan medis (1)					
SPA					
identifikasi kebutuhan SPA kedokteran nuklir, radioterapi, layanan onkologi	monitoring kesiapan ruang layanan kedokteran nuklir (rajal & ranap)	ruang layanan kedokteran nuklir (rajal & ranap) siap operasional	monitoring kelengkapan sarpras rajal ranap kedokteran nuklir	monitoring kelengkapan sarpras rajal ranap kedokteran nuklir	monitoring kelengkapan sarpras rajal ranap kedokteran nuklir

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
pengadaan alkes : X ray fluoroscopy, USG	proses penyediaan ruang intensive imunitas rendah	ruang intensive imunitas rendah tersedia	monitoring kelengkapan sarpras ruang intensive imunitas rendah	monitoring kelengkapan sarpras ruang intensive imunitas rendah	monitoring kelengkapan sarpras ruang intensive imunitas rendah
	monitoring kesiapan alat kedokteran nuklir yang telah tersedia (SPECT, hot lab beserta kelengkapannya)	SPECT CT beserta kelengkapannya siap operasional	monitoring kinerja SPECT CT	monitoring kinerja SPECT CT	monitoring kinerja SPECT CT
	pengadaan alkes : 3D brachyterapi, robotic surgery & proses perijinannya	3D brachyteraphy & robotic surgery siap operasional	monitoring kinerja 3D brachyterapi & robotic surgery	monitoring kinerja 3D brachyterapi & robotic surgery	monitoring kinerja 3D brachyterapi & robotic surgery
		pengadaan alkes : PET scan, imaging diagnostic, technegas, lab in vitro, radiation protection system & proses perijinannya	monitoring kinerja PET scan, imaging diagnostic, technegas, lab in vitro, radiation protection system	monitoring kinerja PET scan, imaging diagnostic, technegas, lab in vitro, radiation protection system	monitoring kinerja PET scan, imaging diagnostic, technegas, lab in vitro, radiation protection system
			pengadaan alkes : SRT radioterapi & proses perijinannya, pemeriksaan genetic	monitoring kinerja SRT radioterapi	monitoring kinerja SRT radioterapi
				pengadaan alkes : proton theraphy & instrumen set transplant sumsum tulang	monitoring kinerja proton therapy & instrumen set transplan sumsum tulang
Jejaring					

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
Penjajagan dengan Rumah Sakit Dharmais dan RSCM	MOU dengan Rumah Sakit Dharmais dan RSCM	MOU dengan Rumah Sakit Dharmais dan RSCM	Penjajagan dengan salah satu center di Asia Tenggara	MOU dengan salah satu center di Asia Tenggara	MOU dengan salah satu center di Asia Tenggara
Pelatihan					
identifikasi kebutuhan & penjajagan dengan RS pengampu	Proctorship (Bedah tumor/Terapi sistemik/Layanan patologi anatomi/Layanan paliatif/manajemen nyeri)	Proctorship (Bedah tumor/Terapi sistemik/Layanan patologi anatomi/Layanan paliatif/manajemen nyeri)	Proctorship (Bedah tumor lanjut, Diagnostik radiologi onkologi, Layanan radioterapi	Proctorship (Bedah tumor lanjut, Bedah Mikro, Kedokteran Nuklir)	Proctorship (Bedah tumor lanjut, Bedah Mikro, Kedokteran Nuklir)
	pelatihan onkologi perawat	pelatihan onkologi perawat	pelatihan onkologi perawat	pelatihan onkologi perawat	pelatihan onkologi perawat
	pelatihan kemoterapi perawat	pelatihan kemoterapi perawat	pelatihan kemoterapi perawat	pelatihan kemoterapi perawat	pelatihan kemoterapi perawat
	pelatihan kanker dasar perawat	pelatihan kanker dasar perawat	pelatihan kanker dasar perawat	pelatihan kanker dasar perawat	pelatihan kanker dasar perawat
	pelatihan handling cytotoxic	pelatihan handling cytotoxic	pelatihan handling cytotoxic	pelatihan handling cytotoxic	pelatihan handling cytotoxic
	pelatihan registrasi kanker	monitoring pelaksanaan registrasi kanker	monitoring pelaksanaan registrasi kanker	monitoring pelaksanaan registrasi kanker	monitoring pelaksanaan registrasi kanker
Penelitian					
Identifikasi Penelitian yang dibiayai RS	Pelayanan Ontologi/Terapi Sistimik/Radioterapi	Pelayanan Ontologi/Terapi Sistimik/Radioterapi	Pelayanan Ontologi/Terapi Sistimik/Radioterapi/kedokteran nuklir	Pelayanan Ontologi/Terapi Sistimik/Radioterapi/kedokteran nuklir/Terapi Komprehensif dan mutakhir	Pelayanan Ontologi/Terapi Sistimik/Radioterapi/kedokteran nuklir/Terapi Komprehensif dan mutakhir

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
Proses Bedah					
Biopsi, Bedah tumor dasar, Bedah tumor lanjut	Biopsi, Bedah tumor dasar, Bedah tumor lanjut	Biopsi, Bedah tumor dasar, Bedah tumor lanjut, Bedah tumor canggih	Biopsi, Bedah tumor dasar, Bedah tumor lanjut, Bedah tumor canggih dengan rekonstruksi mikro, EBUS, RFA, Crysosurgery	Biopsi, Bedah tumor dasar, Bedah tumor lanjut, Bedah tumor canggih dengan rekonstruksi mikro, EBUS, RFA, Crysosurgery Bedah tumor canggih dengan Hyperthermic Intraperitoneal Chemotheraphy, Stanting dengan Kolonoskopi, Endoscopy Subcosal Dissection, Endoscopy Mucosal Resection	Biopsi, Bedah tumor dasar, Bedah tumor lanjut, Bedah tumor canggih dengan rekonstruksi mikro, EBUS, RFA, Crysosurgery Bedah tumor canggih dengan Hyperthermic Intraperitoneal Chemotheraphy, Stanting dengan Kolonoskopi, Endoscopy Subcosal Dissection, Endoscopy Mucosal Resection
RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO (Layanan Unggulan Bedah Saraf)					
Persiapan implementasi Pelayanan Onkologi Skullbase (tumor tulang yang membentuk dasar kepala). SPA dan SDM masih dalam proses penyediaan	Pelayanan Spine (tulang belakang) terutama kasus spine degeneratif (keturunan)	Pengembangan Pelayanan Spine (minimal invasif dan kasus spine degeneratif) dengan pembentukan : 1. Tim Onkologi (dengan Neurologi) 2. Tim Neuroendokrin (dengan penambahan Konsultan Endokrin, Neurologi)	Membentuk Tim Epilepsy Surgery (dengan Neurologi dan IKA) yaitu pengobatan kejang epilepsi yang tidak terkontrol dengan obat-obatan dan terapy lainnya.	Penambahan SDM (spesialis bedah saraf) untuk memperkuat layanan bedah saraf dan mengirimkan SDM untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan peningkatan kompetensi	Pelayanan Robotic Spine Surgery (Pembedahan tulang belakang dengan menggunakan robot)
Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pengembangan	Pemenuhan alat kedokteran (Exosope Orb Eye Olympus, Viewer	Pemenuhanalat kedokteran (O-Arm Intraoperative, Set Endoscopi Kranial,	Pemenuhan alat kedokteran (Neurosurgery Sonastar XS-E, Ultrasonic Aspirator Sistem dan	Pemenuhan alat kedokteran High Speed Drill (regenerasi instrumen)	Pemenuhan Alat Kedokteran Robotic Spine Surgery

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
pelayanan bedah saraf	Dicom Radiologi Intra Hospital, Microsurgery Oncology Set)	Basic Craniotomy Set)	Handpiece, Basic Laminectomy Lumbal dan Cervical Set)		
Pemenuhan dan pengembangan SDM	Peningkatan kompetensi dokter sub spesialis (Fellowship Spine, Followshipe onkologi invasif dan kasus spine), pelatihan perawat pendamping intra operative monitoring	Membentuk tim Onkologi dengan Neurologi, pelatihan perawat catlah neurointervensi	Membentuk tim Neuroendokrin dengan IPD Endokrin dan penambahan IPD, pelatihan rutin perawat khusus bedah saraf. konsultan Endokrin neurologi.	Membentuk tim epilepsi surgery dengan neurologi dan IKA, pelatihan rutin perawat khusus bedah saraf.	Penambahan personil lulusan bedah saraf dan CME (Continuing Medical Education), pelatihan rutin perawat khusus bedah saraf.
RSUD dr.Adhyatma, MPH					
1. Pelayanan laparoscopy endoscopy dasar dan intermediate	1. Pelayanan laparoscopy dan endoscopy advance	1. Pelayanan ERCP (Endoscopic Retrograde cholangio Pancreatography) dalam rangka pengembangan bedah digestif	1. Pelayanan hepatic Surgery (operasi bedah hati)	1. Pelayanan robotic surgery	1. Pemenuhan hybrid operating theater
2. Pelayanan colorectal surgery (bedah colorectal)	2. Pengembangan Digestif vasculer Kolaboratif layanan angiography dan angioplasty dalam	2. Pengembangan digestif kolaboratif layanan Endovascular	2. Pengembangan digestif vascular kolaboratif layanan carotid disease management (carotid stenting/Endarterektomi)		

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
	Diabetic food management, deep vein thrombosis, dan Embolisasi tumor/AVM	Aneurym repair (EVAR/TEVAR)			
3. Pengembangan layanan one day care surgery					
RSUD dr. REHATTA					
Pelayanan Neuro Minimal Invasif Terpadu					
Peningkatan kapasitas SDM guna mendukung pelayanan Neuro Minimal Invasif Terpadu (1 Dokter Spesialis Neurologi, Perawat)	1. Pembangunan Gedung Rawat jalan Neuro Invasif Terpadu	Pembangunan Gedung Power House	1. Pemenuhan peralatan tambahan Digital Subtraction Angiography (DSA)	Rehabilitasi pasca neuro minimal invasive (Peningkatan kapasitas SDM dan Pengadaan alat kesehatan rehabilitasi medik)	Pembangunan Gedung Rawat Inap Neuro Terpadu
	2. Pengadaan Alat Kesehatan Transcranial Magnetic Stimulator (TMS) Robotics		2. Peningkatan kapasitas SDM guna mendukung layanan DSA (1 Dokter Spesialis Neurologi, 1 Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer)		
RSJD Dr. Amino Gondohutomo					
Layanan Rehabilitasi NAPZA					
- Penyempurnaan Modul Layanan Napza	- Review kerjasama layanan Napza dengan lembaga terkait	- Pengembangan layanan rawat inap dan rawat jalan untuk NAPZA	- Pengembangan digitalisasi layanan	- Terpenuhinya SDM tetap Sub Spesialis Adiksi	- Pemantapan mutu layanan

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
- Penyediaan Layanan Rawat Jalan Napza	- Review kerjasama layanan dengan Panti Rehabilitasi Napza	- Pemenuhan sarana prasarana di ruang rawat inap	- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
- Pemenuhan Standar Ruangan	- Evaluasi penyelenggaraan dan mutu layanan	- Pengiriman pendidikan dokter Sub Spesialis Adiksi			
- Kerjasama Konselor Adiksi	- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan			
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan & tenaga medis : Studi banding ke rumah sakit lain					
RSJD Arif Zainudin					
Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan Rawat Jalan spesialis dan sub spesialis	Pemenuhan sarana dan prasarana dan penunjangnya untuk pelayanan Peralatan & Mesin atau Alat Kesehatan, Meubelair dan	Pemenuhan sarana dan prasarana dan penunjangnya untuk pelayanan Peralatan & Mesin atau Alat Kesehatan, Meubelair dan	Pemenuhan sarana prasarana dan penunjangnya untuk pelayanan spesialis dan sub spesialis, Peralatan & Mesin atau Alat Kesehat Meubelair dan perlengkapan rumah tangga lainnya.	Pemenuhan sarana prasarana dan penunjangnya untuk pelayanan spesialis dan sub spesialis, Peralatan & Mesin atau Alat Kesehatan Meubelair dan perlengkapan rumah tangga lainnya.	Pemenuhan sarana prasarana dan penunjangnya untuk pelayanan spesialis dan sub spesialis, Peralatan & Mesin atau Alat Kesehat Meubelair dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
	perlengkapan rumah tangga lainnya.	perlengkapan rumah tangga lainnya.			
Pengembangan pelayanan sub spesialis jiwa (geriatri, Nafza, anak dan remaja, komunitas) spesialis Penyakit Dalam, anak perawat, fisioterapi, rehab medik, spesialis saraf, kulit dan kelamin dan spesialis lainnya	Kapasitas : 20 TT Renovasi / rehabilitasi gedung/ruangan untuk mendukung layanan spesialis dan subspesialis serta layanan unggulan	Kapasitas : 20 TT Renovasi /rehabilitasi gedung /ruangan untuk mendukung layanan spesialis dan subspesialis serta layanan unggulan	Pelayanan Daycare dengan kapasitas 30 TT untuk mendukung layanan spesialis dan subspesialis serta layanan unggulan	Pelayanan Daycare dengan kapasitas 30 TT untuk mendukung layanan spesialis dan subspesialis serta layanan unggulan	Pemanfaatan teknologi kedokteran dalam rangka mendukung layanan spesialis dan subspesialis serta layanan unggulan
Pemenuhan dan pengembangan SDM layanan sub spesialis jiwa (geriatri, Nafza, anak dan remaja, komunitas) spesialis Penyakit Dalam, anak perawat,	Peningkatan kompetensi SDM sub spesialis jiwa (geriatri, Nafza, anak dan remaja, komunitas) spesialis Penyakit Dalam, anak perawat, fisioterapi, rehab medik, spesialis	Peningkatan kompetensi SDM sub spesialis jiwa (geriatri, Nafza, anak dan remaja, komunitas) spesialis Penyakit Dalam, anak perawat, fisioterapi, rehab medik, spesialis	Peningkatan kompetensi SDM sub spesialis jiwa (geriatri, Nafza, anak dan remaja, komunitas) spesialis Penyakit Dalam, anak perawat, fisioterapi, rehab medik, spesialis saraf, kulit dan kelamin dan spesialis lainnya	Penambahan SDM untuk memperkuat layanan sub spesialis jiwa (geriatri, Nafza, anak dan remaja, komunitas) spesialis Penyakit Dalam, anak perawat, fisioterapi, rehab medik, spesialis saraf, kulit dan kelamin dan spesialis lainnya	Pelatihan/kursus peralatan teknologi kedokteran

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
fisioterapi, rehab medik, spesialis saraf, kulit dan kelamin dan spesialis Lainnya	saraf, kulit dan kelamin dan spesialis lainnya	saraf, kulit dan kelamin dan spesialis lainnya			
RSJD Dr RM Soedjarwadi (Kesehatan Jiwa Anak & Remaja)					
Pengiriman pendidikan 1 Dokter Spesialis Jiwa & 1 Dokter Spesialis Anak Sub Spesialis (konsultan jiwa anak remaja & konsultan tumbuh kembang anak)	Pengiriman pendidikan 1 Dokter Spesialis Jiwa & 1 Dokter Spesialis Anak Sub Spesialis (konsultan jiwa anak remaja & konsultan tumbuh kembang anak)	Pembuatan DED ruang layanan anak remaja terpadu	Pengadaan gedung layanan anak remaja terpadu	Diklat rehabilitasi medik pada kasus ABK (Bagi dokter & terapis)	Peresmian & operasional gedung layanan anak remaja terpadu
Peningkatan kapasitas Nakes pendukung Keswa Arema	Peningkatan kapasitas Nakes pendukung Keswa Arema	Pengadaan & pelatihan penggunaan alat kesehatan : Biofeedback & TMS untuk Anak/Remaja	Diklat modalitas terapi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Diklat bagi Dokter Spesialis Neurologi untuk operasionalisasi EEG	Membangun jejaring dengan lembaga terkait
		Pengiriman pendidikan Dokter Spesialis Jiwa & Dokter Spesialis Anak Sub Spesialis (konsultan jiwa anak remaja & konsultan	Pengadaan peralatan terapi pd ABK	Diklat bagi Psikolog tentang assesment & penatalaksanaan Psikologi pada ABK	

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
		tumbuh kembang anak)_Lanjutan			
		Peningkatan kapasitas Nakes pendukung Keswa Arema	Pengiriman pendidikan Dokter Spesialis Jiwa & Dokter Spesialis Anak Sub Spesialis (konsultan jiwa anak remaja & konsultan tumbuh kembang anak)_Lanjutan	Diklat bagi Dokter Gigi tentang penanganan gigi anak	
			Peningkatan kapasitas Nakes pendukung Keswa Arema	Membangun jejaring dengan lembaga terkait	
RSMD Soepardjo Roestam					
Persiapan Operasional RSMD Soepardjo Roestam	Pemenuhan Alat Kesehatan, sarana prasarana penunjang, Peralatan & Mesin, Meubelair dan perlengkapan rumah tangga lainnya untuk Pelayanan Sub Spesialistik Surgical Vitreoretina.	Pemenuhan Alat Kesehatan, sarana prasarana penunjang, Peralatan & Mesin, Meubelair dan perlengkapan rumah tangga lainnya untuk Pelayanan Sub Spesialistik LASIK dan Okuloplasti Rekonstruksi	Pemenuhan Alat Kesehatan, sarana prasarana penunjang, Peralatan & Mesin, Meubelair dan perlengkapan rumah tangga lainnya untuk Pelayanan Sub Spesialistik Pediatrik Ophtalmologi dan Glaukoma	Pemenuhan Alat Kesehatan, sarana prasarana penunjang, Peralatan & Mesin, Meubelair dan perlengkapan rumah tangga lainnya untuk Pelayanan Sub Spesialistik Keratoplasty- Bank Mata	Pemenuhan Alat Kesehatan, sarana prasarana penunjang, Peralatan & Mesin, Meubelair dan perlengkapan rumah tangga lainnya untuk Pelayanan Sub Spesialistik Low Vision.

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
1	2	3	4	5	6
	Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk pelayanan sub spesialistik Surgical Vitreoretina	Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk pelayanan sub spesialistik LASIK dan Okuloplasti Rekonstruksi	Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk pelayanan sub spesialistik Pediatrik Ophtalmologi dan Glaukoma	Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk pelayanan sub spesialistik Keratoplasty- Bank Mata	Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk pelayanan sub spesialistik Low Vision

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan jangka menengah tahun 2025–2029, dinas kesehatan dan rumah sakit provinsi jawa tengah mengidentifikasi berbagai risiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Risiko-risiko ini terutama terkait dengan upaya peningkatan kualitas kesehatan dan penurunan insiden stunting balita sebagai salah satu indikator utama kesehatan masyarakat.

Manajemen risiko dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi risiko, analisis tingkat risiko, hingga penyusunan rencana tindak pengendalian yang dapat diimplementasikan oleh unit kerja terkait. Proses ini dimaksudkan agar program dan kegiatan pembangunan kesehatan tetap berada dalam jalur yang efektif, efisien, serta adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut:

TABEL 3.4

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TERHADAP RISIKO STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAN RS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan								
	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu	Kematian ibu akibat resiko obstetric dan non obstetric	Sangat tinggi	Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Tidak ada peningkatan dalam penurunan kematian ibu	Komitmen penurunan kematian ibu di fasyankes primer dan rujukan sebelum pengajuan perpanjangan ijin operasional	Kepala Bidang Kesmas	2025 - 2029
		Angka kematian balita	Kematian balita akibat penyakit menular dan tidak menular	Tinggi	Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Menurunnya kasus penyakit menular dan tidak menular pada balita	Screening faktor penyakit menular dan tidak menular pada balita dengan tatakelola Paripurna	Kepala Bidang Kesmas	2025 - 2029
	Menurunnya penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM)	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	Capaian skrining ptm rendah, meningkatnya angka kesakitan dan kematian PTM	Tinggi	Sosialisasi dan kie belum efektif	Meningkatnya angka kesakitan dan kematian ptm	Melaksanakan perencanaan dan evaluasi secara rutin	Kepala Bidang P2P	2025 - 2029
		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	Resiko tinggi penyakit menular dan Daerah endemis	Sangat tinggi	Keterlambatan diteksi dini dan tatalaksana Kasus	Meningkatnya kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit menular	Perencanaan dan evaluasi, kordinasi, validasi data	Kepala Bidang P2P	2025 - 2029

	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tidak ada komitmen pimpinan faskes dalam pemenuhan standar Faskes	Tinggi	Perubahan regulasi terkait dengan standarisasi pelayanan kesehatan	Angka kesakitan dan morbiditas meningkat	Melakukan verifikasi dan validasi usulan sdm dan spa sesuai standar	Kepala Bidang Yankes	2025 - 2029
	Terkendalinya penyakit akibat kejadian luar biasa (KLB) dan bencana	Persentase Kabu-Paten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian KLB, Bencana, dan Kesehatan Lingkungan	Keterlambatan respon kab/kota dalam KLB/bencana	Sangat tinggi	Peningkatan dan penyebaran wilayah kasus penyakit potensi klb dan krisis kesehatan pada situasi bencana	Peningkatan klb, dan kematian	Integrasi penyilidikan epidemologi untuk klb, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana	Kepala Bidang P2P	2025 - 2029
	Meningkatnya jaminan pembiayaan kesehatan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Adanya kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pendataan penerima manfaat	Sangat tinggi	Masih ada penerima PBI belum tepat sasaran	Belum semua sasaran mendapatkan PBI	Kordinasi pelaksanaan kebijakan pada lintas OPD dan pemerintah pusat	Kepala Bidang Yankes	2025 – 2029
2	Menurunnya kasus stunting	Persentase Penurunan Kasus Stunting	Kebutuhan gizi seimbang keluarga tidak terpenuhi	Sangat tinggi	Kurangnya pemenuhan gizi seimbang di keluarga	Kasus stunting meningkat	Penguatan pelayanan kesehatan dasar pada sasaran ibu hamil, bayi, balita, usia sekolah remaja dan calon pengantin	Kepala Bidang Kesmas	2025 - 2029
RSUD Dr. Moewardi									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/ Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD Dr. Moewardi	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSUD Dr.Moewardi	Kasus medis yang dilayani tergolong kompleks dan rumit	12	RSUD Dr. Moewardi merupakan RS kelas A yang merupakan rujukan terakhir	Target nett death rate (angka kematian bersih) tidak tercapai.	Usulan peninjauan ulang indikator Standar Pelayanan Minimal khususnya target NDR di rumah sakit kelas A (rujukan tersier)	Direktur	2030

2.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indek Kepuasan Masyarakat RSUD Dr.Moewardi	Pelayanan tidak sesuai standar	12	Sumber daya pelayanan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang terbatas	Komplain pengguna layanan meningkat	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan sesuai standar	Direktur	2030
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko RSUD Dr.Moewardi	Terdapat risiko potensial yang tidak teridentifikasi	12	Pengelolaan risiko RS rendah	Kinerja RS rendah	peningkatan kompetensi tim manajemen risiko RS	Direktur	2030
RSUD Prof Dr Margono Soekarjo									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan belum optimal	12	Sistem pembiayaan pelayanan yang tinggi dan rujukan berjenjang	target nett death rate (angka kematian bersih) tidak tercapai	Penguatan jejaring layanan kesehatan dan perbaikan kebijakan rujukan.	Direktur	2030

2.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indek Kepuasan Masyarakat RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Pelayanan tidak sesuai standar	12	Sumber daya pelayanan yang tersedia kualitas dan kualitasnya belum terpenuhi sesuai standar	Mutu pelayanan dan kompetensi pelayanan SDM tidak sesuai harapan	1. Pemenuhan sarana prasarana yang sesuai standar 2. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan edukasi sesuai standar. 3. Peningkatan promosi kesehatan kepada pasien, keluarga dan jejaring.	Direktur	2030
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Standar Pelayanan Minimal tidak tercapai	12	Kurang tepat dalam penyusunan register resiko rumah sakit dan rencana tindak penyendaliannya	SPIP tidak terpenuhi	1. Sosialisasi manajemen resiko pada semua unsur di rumah sakit. 2. Monitoring dan evalusi terhadap implementasi rencana tindak pengendalian yang sudah ada.	Direktur	2030
RSUD dr. Adhyatma, MPH									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSUD dr. Adhyatma, MPH	Pasien masuk ke RSUD dr. Adhyatma, MPH dengan tingkat keparahan berat	12	Kebijakan Sistem rujuk berjenjang BPJS	1. Angka kematian IGD < 24 jam tinggi 2. Angka kematian < 48 jam setelah rawat inap tinggi	1. Peningkatan kompetensi SDMK 2. Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar secara bertahap dan sesuai prioritas	Direktur	2030

2.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Mening katn ya kualitas pelayanan perangkat Daerah RSUD Dr. Adhyatma, MPH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indek Kepuasan Masyarakat RSUD dr. Adhyatma, MPH	Waktu tunggu pelayanan pasien panjang	12	Pelayanan pasien belum sesuai dengan standar respontime	Reputasi RS menjadi jelek	1. Evaluasi dan sosialisasi terkait SPO respon time pelayanan 2. Peningkatan kompetensi SDMK 3. Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Direktur	2030
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Mening katn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah RSUD Dr. Adhyatma, MPH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko RSUD dr. Adhyatma, MPH	Budaya pengelolaan risiko belum optimal	12	Pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko belum memadai	Tujuan Rumah Sakit tidak tercapai	1. Melakukan sosialisasi pengelolaan risiko kepada semua staf di RSUD dr. Adhyatma, MPH 2. Menerapkan budaya pengelolaan risiko diseluruh unit rumah sakit 3. Monev pengelolaan risiko setiap semester	Direktur	2030
RSUD dr. Rehatta									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meni ngk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD dr. Rehatta	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSUD dr. Rehatta	Kompleksitas dan keparahan kasus pasien yang dilayani	12	1. Kesulitan akses geografis 2. Kebijakan rujukan berjenjang BPJS dan Kebijakan birokrasi pemerintah kabupaten	Peningkatan Dead On Arrival (DOA) di IGD dan Kematian ≥48 jam di Rawat inap	1. Pengembangan kompetensi SDM Kesehatan 2. Pemenuhan sarana prasarana 3. Advokasi dan Kolaborasi dengan Pemerintah kabupaten dan BPJS	Direktur	2030
2.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD	Memanjangnya waktu tunggu di pelayanan	12	1. Kurangnya ketersediaan dokter spesialis 2. Sarana Prasarana kurang	1. Penurunan kunjungan 2. Penurunan pendapatan	1. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut alur pelayanan 2. Melakukan evaluasi kinerja staf 3. Perbaikan dan	Direktur	2030

	dinamis/Meningkatn ya kualitas pelayanan perangkat daerah	dr. Rehatta			memadai		pemenuhan sarana prasarana sesuaiprioritas dan bertahap 4. Pengusulan formasi ASN dokter spesialis		
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko RSUD dr. Rehatta	Budaya pengelolaan risiko belum optimal	12	Pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko belum memadai	Tujuan Rumah Sakit tidak tercapai	1. Melakukan sosialisasi pengelolaan risiko kepada semua staf di RSUD dr. Rehatta 2. Menerapkan budaya pengelolaan risiko diseluruh unit rumah sakit 3. Monev pengelolaan risiko setiap 4. Triwulan	Direktur	2030
RSJD Dr. Amino Gondohutomo									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Kemampuan rumah sakit dalam mencapai target NDR yang semakin menurun setiap tahunnya	12	Kondisi pasien saat masuk ke RSJD Dr. Amino Gondohutomo sudah membutuhkan penanganan intensif	Angka kematian <48 jam setelah rawat inap tinggi	1. Monitoring berkala penerapan standar akreditasi rumah sakit 2. Monitoring capaian SPM rumah sakit 3. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, workshop 4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Direktur	2030

2.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Mening katn ya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Kepuasan Masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Sistem pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi pengunjung/ pasien	12	1. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada pengunjung 2. Sarana prasarana kurang memadai	Ketidakpuasan pengunjung/pa sien terhadap layanan yang telah diterima	1. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat 2. Perbaikan dan pemenuhan sarana prasarana sesuai prioritas dan bertahap 3. Peningkatan kompetensi SDMK 4. Optimalisasi layanan pengaduan 5. Penguatan budaya pelayanan prima (service excellent) melalui pelatihan berkesinambungan	Direktur	2030
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Mening katn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Penerapan budaya pengelolaan risiko yang belum maksimal	12	Tingkat pengelolaan risiko oleh pemilik risiko masih kurang memadai.	Keterlambatan Penanganan Masalah atau Menanggulangi Risiko	1. Menyelenggarakan sosialisasi mengenai pengelolaan risiko kepada seluruh pegawai 2. Menerapkan budaya pengelolaan risiko di setiap unit RS. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan risiko setiap semester	Direktur	2030
RSJD Dr. Arif Zainudin									

1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSJD Dr. Arif Zainudin	NDR pada RSJD Dr. Arif Zainudin sangat tinggi	12	1. Keterbatasan sarana dan prasarana; 2. Kondisi pasien saat dirujuk sudah memburuk, 3. Penanganan pasien kurang maksimal	1. Kredibilitas Rumah Sakit rendah 2. Kepercayaan masyarakat menurun	1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; 2. Peningkatan kualitas perawatan dan pelayanan klinis; 3. Peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenga kesehatan pendukung lainnya;	Direktur	2030
2.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis/Meningkat nya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Kepuasan Masyarakat RSJD Dr. Arif Zainudin	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap RSJD Dr. Arif Zainudin rendah	12	Kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit tidak sesuai harapan masyarakat	1. Kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit menurun; 2. Masyarakat yang mempercayakan pengobatan di rumah sakit RSJD Dr. Arif Zainudin berkurang; 3. Kredibilitas rumah sakit menurun; 4. Pendapatan rumah sakit berkurang	Memperkecil kesenjangan antara harapan dan kenyataan melalui : 1. Peningkatan sarana dan prasarana; 2. Efisiensi dan kenyamanan dalam pelayanan; 3. Peningkatan kualitas perawatan dan pelayanan klinis; 4. Peningkatan pola komunikasi dan hubungan pasien dengan petugas; 5. Transparansi dan kejelasan biaya dan penagihan	Direktur	2030

3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Mening katn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah RSJD Dr. Arif Zainudin	Pengelolaan Manajemen Risiko di RSJD Dr. Arif Zainudin tidak berjalan sesuai ketentuan	12	1. Pengetahuan tentang manajemen risiko rendah 2. Tidak ada komitmen pimpinan	Banyak kasus yang muncul dan merugikan institusi rumah sakit	1. Peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan manrisk; 2. Membuat komitmen bersama; 3. Menetapkan tim pengelola manrisk; 4. Melakukan monev secara berkala	Direktur	2030
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meni ngk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Rendahnya mutu pelayanan sehingga dapat memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan risiko kematian	15	Tidak semua standar pelayanan dilaksanakan dengan benar dan konsisten	Meningkatnya risiko kematian	1. Monitoring berkala penerapan standar akreditasi Rumah Sakit 2. Monitoring capaian SPM rumah sakit	Direktur	2030
2.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis/Mening kat nya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Kepuasan Masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Sistem pelayanan tidak efektif dan efisien	15	Sistem pelayanan kurang efektif dan sarpras belum memenuhi standar	Komplain/ ketidakpuasan pasien	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem layanan dan sarpras rumah sakit	Direktur	2030

3.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis/Meningkat nya kualitas indeks pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Proses manajemen risiko tidak mencakup semua proses bisnis rumah sakit	12	Belum terpadunya manajemen resiko dengan proses bisnis rumah sakit	Mitigasi risiko tidak berkontribusi maksimal terhadap core bisnis rumah sakit	Monitoring pengelolaan manajemen risiko sampai unit kerja terkecil	Direktur	2030
RSMD Soepardjo Roestam									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSMD Soepardjo Roestam	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSMD Soepardjo Roestam	Rendahnya mutu pelayanan sehingga dapat memperburu k kondisi pasien dan meningkatkan risiko kematian	15	Tidak semua standar pelayanan dilaksanakan dengan benar dan konsisten	Meningkatnya risiko kematian	1. Monitoring berkala penerapan standar akreditasi rumah sakit 2. Monitoring capaian SPM rumah sakit	Direktur	2030
2.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis/Meningkat nya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indek Kepuasan Masyarakat RSMD Soepardjo Roestam	Pelayanan tidak sesuai standar	16	Sumber daya pelayanan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang terbatas	Komplain pengguna layanan berpotensi meningkat	1. Pemenuhan jumlah SDM 2. Peningkatan kompetensi SDMK 3. Pemenuhan sarana prasarana yang sesuai standar	Direktur	2030

3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko RSMD Soepardjo Roestam	Terdapat risiko potensial yang tidak teridentifikasi	16	Pengelolaan risiko RS rendah	Kinerja RS rendah	peningkatan kompetensi tim manajemen risiko RS	Direktur	2030

Strategi pengendalian risiko akan terus diperkuat secara lintas bidang dan lintas sektor, melalui:

1. Memperluas edukasi gizi keluarga,
2. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan ibu anak.
3. Peningkatan skrining penyakit menular
4. Memperkuat desa siaga sehat iklim
5. Memfasiltasi penguatan klaster kesehatan di kabupaten kota.
6. Menjalin sinergi antara pemangku kepentingan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
7. Meningkatkan kompetensi sdm kesehatan
8. Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan.

Dalam menindaklanjuti pengendalian risiko dinas kesehatan dan rumah sakit provinsi jawa tengah berkomitmen melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian risiko, dalam rangka memastikan tercapainya target-target pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah.

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Mengacu pada visi dan misi Gubernur Jawa Tengah tahun 2025–2029, serta tujuan, sasaran dan strategi yang mendukung tercapainya visi dan misi tersebut dari bidang kesehatan, maka program, kegiatan, subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang disusun untuk kurun waktu 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Khusus dan Upaya Kesehatan Masyarakat**; program ini diarahkan pada kegiatan penurunan kematian ibu, bayi, balita; peningkatan kualitas lingkungan; peningkatan penemuan dan pencegahan PM, PTM dan Keswa; pemenuhan sarana prasarana, alat di UPT dan RS Provinsi, penyediaan obat, peningkatan sistem informasi, dan meningkatkan standarisasi pelayanan di rumah sakit dan kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit guna mendukung indikator: Presentase Kab/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di 4 wilker Balkesmas; Persentase penurunan kasus kematian ibu; Persentase Kab/Kota dengan RS mencapai Case fatality rate CFR Direct Obstetric (eklamsi dan perdarahan) <1%; Angka Kematian Bayi (AKB); Persentase Kabupaten Kota dengan Treatment Coverage dan TSR >= 92% di 4 wilker Balkesmas; Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (TC); Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR); Insidensi HIV, Eliminasi malaria, Eliminasi NTDs (Pengendalian Kasus Filariasis dan Kusta); Angka kematian Dengue; Insidensi Hepatitis B; Prosentase kab/kota wilayah kerja yang melaksanakan skrining Keswa & PTM Prioritas dengan cakupan minimal 50% di 4 wilker Balkesmas; Persentase Kab/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja; Persentase lanjut usia yang mandiri; Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG); Persentase Hipertensi dalam pengendalian; Persentase *Diabetes mellitus* (DM) terkendali; Persentase merokok penduduk usia 10-21 th; Cakupan Persentase kab/kota dengan peningkatan aktifitas fisik; Persentase kab/kota melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara, Ca Cerviks); Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun; Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar; Persentase fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN); Persentase peningkatan mutu layanan di 4 Balkesmas sesuai standar; Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Primer dengan Sarana, Prasarana, Alat (SPA) kesehatan sesuai Standar; Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasyankes Primer terakreditasi paripurna; Persentase Kabupaten/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu; Persentase Fasyankes Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan SPA kesehatan sesuai Standar; Persentase kabupaten/kota dengan fasyankes lanjutan terakreditasi paripurna; Persentase Kabupaten/Kota dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tingkat 2 sesuai standar; Persentase Peningkatan mutu layanan

Balabkes PAK sesuai standar; Persentase Kabupaten/Kota yang terlayani pelayanan laboratorium dan kalibrasi di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan; Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di 4 wilker Balkesmas; Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok; Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah dan bencana; Presentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan; Presentase Kabupaten/Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan; Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif; Persentase kabupaten/kota dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran di 4 Wilker Balkesmas; Prevalensi wasting balita; Persentase indikator mutu pelayanan medis yang memenuhi target di RSUD dr. Moewardi; Persentase indikator mutu pelayanan keperawatan yang memenuhi target di RSUD dr. Moewardi; Persentase penyediaan fasilitas, sarana dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD dr.Moewardi; Persentase alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD dr.Moewardi; Persentase Penyediaan Prasarana, Obat dan BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD dr.Moewardi; Persentase indikator mutu pelayanan penunjang medis dan penunjang sarana prasarana yang sesuai standar di RSUD dr.Moewardi; persentase capaian kinerja pelayanan pendidikan dan penelitian yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit di RSUD dr.Moewardi; Persentase pemenuhan fasilitas sarpras, prasarana, alkes, obat-BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan RS di RSUD dr.Margono Soekarjo; Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. Adhyatma, MPH; presentase penyediaan fasilitas alat kesehatan, prasarana dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. Adhyatma, MPH; presentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSUD dr. Adhyatma, MPH; Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. Rehatta; Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. Rehatta; Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan RS di RSUD dr. Rehatta; Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo; Persentase Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo; Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan RS di RSJD Dr. Amino Gondohutomo; Persentase pasien jiwa bunuh diri di RSJD Dr. Amino Gondohutomo; Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. Arif Zainudin; Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan

unggulan RS di RSJD Dr. Arif Zainudin; Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSJD Dr. Arif Zainudin; Persentase Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD Dr. Arif Zainudin; Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Arif Zainudin; Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi; Persentase Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi; Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Layanan RS di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi; Presentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSMD Soepardjo Roestam; Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/alat penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSMD Soepardjo Roestam; Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan RSMD Soepardjo Roestam sesuai standart; Persentase capaian indikator mutu layanan RSMD Soepardjo Roestam

2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**; Program ini diarahkan pada kegiatan promosi, advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor dengan indikator kinerja program yang akan dicapai yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat; Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr.Moewardi, RSUD Prof dr Margono Soekarjo, RSUD dr. Adhyatma, MPH, RSUD dr. Rehatta dan RSMD Soepardjo Roestam; Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo, RSJD dr. Arif Zainudin, dan RSJD dr. RM. Soedjarwadi; Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi di RSJD Dr. Amino Gondohutomo; RSJD dr. Arif Zainudin, dan RSJD dr. RM. Soedjarwadi.

3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan**; Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kompetensi teknis dan kualifikasi SDMK melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar dan workshop yang mendukung Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu: Rasio tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Medis (Named) terhadap populasi; Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang teregestrasi dan berkualitas di Bapelkes Provinsi; Persentase jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan pelatihan/workshop/seminar/bimbingan teknis/sosialisasi di RSUD dr. Moewardi; Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo, RSUD dr. Adhyatma, MPH, RSUD dr. Rehatta, RSJD dr. Arif Zainudin, RSJD dr. Amino Gondohutomo, RSJD dr. RM. Soedjarwadi dan RSMD Soepardjo Roestam.

4. **Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman**; Program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan

(PAK) dengan indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

5. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**. Program ini diarahkan pada peningkatan Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kesehatan dan 6 UPT, Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah; Cost Recovery Rate (CRR) Total di 7 RS Provinsi; Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di 8 RS Provinsi; Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah di 7 RS Provinsi dengan fokus kegiatan pada Peningkatan Pelayanan BLUD; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Adapun keterangan selengkapnya tentang program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.

Tabel Bab 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
DINAS KESEHATAN																		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *								125.152.689.000		126.755.251.000		155.758.580.000		163.690.125.000		156.331.682.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan *	Angka	79,81	84,5		85		85,5		86		86,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kesehatan **							1.394.000.000		1.191.000.000		1.257.000.000		1.399.000.000		1.473.000.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kesehatan **	Angka	2,87	2,88	1.394.000.000	2,89	1.191.000.000	2,9	1.257.000.000	2,91	1.399.000.000	2,92	1.473.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					1.394.000.000		1.191.000.000		1.257.000.000		1.399.000.000		1.473.000.000	Dinas Kesehatan	
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kesehatan		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan ***	%	90	94	1.394.000.000	96	1.191.000.000	98	1.257.000.000	100	1.399.000.000	100	1.473.000.000	Dinas Kesehatan	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****					1.394.000.000		1.191.000.000		1.257.000.000		1.399.000.000		1.473.000.000	Dinas Kesehatan	
		Terpenuhinya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	90	94	1.394.000.000	96	1.191.000.000	98	1.257.000.000	100	1.399.000.000	100	1.473.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****					1.036.000.000		716.000.000		768.000.000		865.000.000		887.000.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	10	10	1.036.000.000	10	716.000.000	10	768.000.000	10	865.000.000	10	887.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas OPD Provinsi Jawa Tengah, 35 Kab/Kota dan Kementerian Pusat, JAWA TENGAH
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****					358.000.000		475.000.000		489.000.000		534.000.000		586.000.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	4	4	358.000.000	4	475.000.000	4	489.000.000	4	534.000.000	4	586.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Evaluasi kinerja perangkat daerah berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas OPD Provinsi Jawa Tengah, 35 Kab/Kota dan Kementerian Pusat, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****					0		0		0		0		0	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Kesehatan
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****					0		0		0		0		0	Dinas Kesehatan	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kesehatan **							123.758.689.000		125.564.251.000		154.501.580.000		162.291.125.000		154.858.682.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan **	Angka	90	90,5	123.758.689.000	90,75	125.564.251.000	91	154.501.580.000	91,25	162.291.125.000	91,5	154.858.682.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					94.947.189.000		95.257.451.000		101.146.780.000		104.378.975.000		110.884.082.000	Dinas Kesehatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kesehatan		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan ***	%	90	90,5	94.947.189.000	90,75	95.257.451.000	91	101.146.780.000	91,25	104.378.975.000	91,5	110.884.082.000	Dinas Kesehatan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					78.623.862.000		82.485.056.000		86.539.308.000		90.796.274.000		95.266.087.000	Dinas Kesehatan	
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam rangka Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	1	3	78.623.862.000	3	82.485.056.000	3	86.539.308.000	3	90.796.274.000	3	95.266.087.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					77.223.862.000		81.085.056.000		85.139.308.000		89.396.274.000		93.866.087.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	540	621	77.223.862.000	621	81.085.056.000	621	85.139.308.000	621	89.396.274.000	621	93.866.087.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****					1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	1	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	4	1.300.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	2	156	50.000.000	156	50.000.000	156	50.000.000	156	50.000.000	156	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	5	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****					451.280.000		511.536.000		578.843.000		654.611.000		740.534.000	Dinas Kesehatan	
		Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	451.280.000	4	511.536.000	4	578.843.000	4	654.611.000	4	740.534.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****					275.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	2	2	275.000.000	2	300.000.000	2	325.000.000	2	350.000.000	2	375.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD *****					176.280.000		211.536.000		253.843.000		304.611.000		365.534.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	4	2	176.280.000	2	211.536.000	2	253.843.000	2	304.611.000	2	365.534.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DKI JAKARTA JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****					350.000.000		350.000.000		350.000.000		360.000.000		360.000.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dakam rangka Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	360.000.000	100	360.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****					0		0		0		0		0	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DIY Yogyakarta, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OPD Provinsi
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	25	25	300.000.000	25	300.000.000	25	300.000.000	25	300.000.000	25	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DKI JAKARTA OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					1.814.347.000		1.703.637.000		1.618.331.000		1.760.064.000		2.007.987.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam rangka Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	1.814.347.000	100	1.703.637.000	100	1.618.331.000	100	1.760.064.000	100	2.007.987.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****					49.560.000		59.472.000		71.366.000		85.639.000		102.767.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	49.560.000	4	59.472.000	4	71.366.000	4	85.639.000	4	102.767.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					338.685.000		212.022.000		254.427.000		305.312.000		366.375.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	338.685.000	4	212.022.000	4	254.427.000	4	305.312.000	4	366.375.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					53.460.000		64.152.000		76.982.000		92.378.000		110.854.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	4	4	53.460.000	4	64.152.000	4	76.982.000	4	92.378.000	4	110.854.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					65.690.000		78.828.000		94.594.000		113.513.000		136.215.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	65.690.000	4	78.828.000	4	94.594.000	4	113.513.000	4	136.215.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****					157.000.000		105.508.000		126.610.000		130.000.000		140.000.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	4	4	157.000.000	4	105.508.000	4	126.610.000	4	130.000.000	4	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****					2.000.000		2.400.000		2.880.000		3.456.000		4.147.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	4	2.000.000	4	2.400.000	4	2.880.000	4	3.456.000	4	4.147.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					128.800.000		134.560.000		141.472.000		149.766.000		159.716.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	128.800.000	4	134.560.000	4	141.472.000	4	149.766.000	4	159.716.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					926.032.000		934.951.000		725.000.000		750.000.000		842.913.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	926.032.000	4	934.951.000	4	725.000.000	4	750.000.000	4	842.913.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR OPD Provinsi
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					93.120.000		111.744.000		125.000.000		130.000.000		145.000.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	3	2	93.120.000	2	111.744.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	145.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DKI JAKARTA JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****					2.700.000.000		1.205.000.000		2.115.000.000		1.550.000.000		2.740.000.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Mebel, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	4	4	2.700.000.000	4	1.205.000.000	4	2.115.000.000	4	1.550.000.000	4	2.740.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Pengadaan Mebel *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	2	50.000.000	2	50.000.000	4	50.000.000	4	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					250.000.000		250.000.000		260.000.000		260.000.000		360.000.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	2	2	250.000.000	2	250.000.000	2	260.000.000	2	260.000.000	2	360.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****					50.000.000		25.000.000		25.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	50.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	2	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					2.300.000.000		830.000.000		1.730.000.000		1.090.000.000		2.130.000.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	2	2	2.300.000.000	2	830.000.000	2	1.730.000.000	2	1.090.000.000	2	2.130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					7.274.020.000		6.646.807.000		6.664.288.000		6.700.515.000		6.812.894.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	7.274.020.000	4	6.646.807.000	4	6.664.288.000	4	6.700.515.000	4	6.812.894.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****					2.380.000.000		2.400.000.000		2.450.000.000		2.490.248.000		2.525.000.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	2.380.000.000	4	2.400.000.000	4	2.450.000.000	4	2.490.248.000	4	2.525.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					157.450.000		149.807.000		164.788.000		181.267.000		199.394.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	157.450.000	4	149.807.000	4	164.788.000	4	181.267.000	4	199.394.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****					4.716.570.000		4.077.000.000		4.029.500.000		4.009.000.000		4.068.500.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4.716.570.000	4	4.077.000.000	4	4.029.500.000	4	4.009.000.000	4	4.068.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					3.733.680.000		2.355.415.000		3.281.010.000		2.557.511.000		2.956.580.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangkaPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		Jumlah unit barang mmilik daerah penunjang urusan pemerintahand aerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	7	50	3.733.680.000	50	2.355.415.000	50	3.281.010.000	50	2.557.511.000	50	2.956.580.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					759.680.000		311.615.000		373.939.000		448.727.000		538.472.000	Dinas Kesehatan	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	4	44	759.680.000	44	311.615.000	44	373.939.000	44	448.727.000	44	538.472.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Mebel *****					60.000.000		72.000.000		86.400.000		103.680.000		124.416.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	2	60.000.000	2	72.000.000	2	86.400.000	2	103.680.000	2	124.416.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					460.000.000		432.000.000		518.400.000		622.080.000		746.496.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	4	10	460.000.000	10	432.000.000	10	518.400.000	10	622.080.000	10	746.496.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****					84.000.000		100.800.000		120.960.000		145.512.000		174.182.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	84.000.000	1	100.800.000	1	120.960.000	1	145.512.000	1	174.182.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****					75.000.000		85.000.000		97.000.000		110.000.000		125.000.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	75.000.000	1	85.000.000	1	97.000.000	1	110.000.000	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					1.491.000.000		609.200.000		1.554.999.000		775.000.000		825.000.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	4	3	1.491.000.000	3	609.200.000	3	1.554.999.000	3	775.000.000	3	825.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi SEMARANG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					804.000.000		744.800.000		529.312.000		352.512.000		423.014.000	Dinas Kesehatan	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	4	8	804.000.000	8	744.800.000	8	529.312.000	8	352.512.000	8	423.014.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					3.801.200.000		4.423.500.000		4.557.700.000		4.747.850.000		4.978.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa ***	%	100	100	3.801.200.000	100	4.423.500.000	100	4.557.700.000	100	4.747.850.000	100	4.978.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					1.500.000.000		1.535.000.000		1.590.000.000		1.593.000.000		1.615.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam rangka Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Balkesmas Wil. Ambarawa		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	1.500.000.000	12	1.535.000.000	12	1.590.000.000	12	1.593.000.000	12	1.615.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****					1.500.000.000		1.535.000.000		1.590.000.000		1.593.000.000		1.615.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	1.500.000.000	12	1.535.000.000	12	1.590.000.000	12	1.593.000.000	12	1.615.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					300.000.000		480.000.000		537.000.000		600.000.000		662.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam rangka Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dukungan Pelaksanaan Sistem		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	300.000.000	100	480.000.000	100	537.000.000	100	600.000.000	100	662.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****					20.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	1	20.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					30.000.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	30.000.000	2	50.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					10.000.000		100.000.000		125.000.000		135.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	10.000.000	4	100.000.000	4	125.000.000	4	135.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					120.000.000		125.000.000		130.000.000		150.000.000		165.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	120.000.000	4	125.000.000	4	130.000.000	4	150.000.000	4	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****					30.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		65.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	2	2	30.000.000	3	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	4	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					10.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	12	10.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					65.000.000		70.000.000		72.000.000		80.000.000		82.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	65.000.000	12	70.000.000	12	72.000.000	12	80.000.000	12	82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					15.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	2	15.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****					220.000.000		460.000.000		377.000.000		401.000.000		432.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Balkesmas Wil. Ambarawa		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	15	220.000.000	20	460.000.000	20	377.000.000	20	401.000.000	20	432.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Pengadaan Mebel *****					20.000.000		200.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	20.000.000	4	200.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					75.000.000		85.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	15	75.000.000	25	85.000.000	20	90.000.000	20	100.000.000	20	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****					50.000.000		65.000.000		72.000.000		76.000.000		82.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	2	50.000.000	2	65.000.000	2	72.000.000	2	76.000.000	2	82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					75.000.000		110.000.000		115.000.000		125.000.000		140.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	4	75.000.000	4	110.000.000	4	115.000.000	4	125.000.000	4	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					1.411.200.000		1.467.500.000		1.515.700.000		1.536.850.000		1.572.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat,Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Balkesmas Wilayah Ambarawa		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	12	1.411.200.000	12	1.467.500.000	12	1.515.700.000	12	1.536.850.000	12	1.572.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					1.200.000		1.500.000		1.700.000		1.850.000		2.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	2	2	1.200.000	2	1.500.000	2	1.700.000	2	1.850.000	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****					480.000.000		520.000.000		550.000.000		560.000.000		580.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	480.000.000	12	520.000.000	12	550.000.000	12	560.000.000	12	580.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					0		0		10.000.000		15.000.000		20.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	N/A	0	N/A	0	2	10.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****					930.000.000		946.000.000		954.000.000		960.000.000		970.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	930.000.000	12	946.000.000	12	954.000.000	12	960.000.000	12	970.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					370.000.000		481.000.000		538.000.000		617.000.000		697.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,Pemeliharaan Mebel,Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,Pemeliharaan Aset Tak Berwujud,Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	4	56	370.000.000	56	481.000.000	60	538.000.000	60	617.000.000	60	697.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					80.000.000		150.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	8	8	80.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	175.000.000	8	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Mebel *****					10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		35.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	5	10.000.000	5	15.000.000	5	20.000.000	5	25.000.000	5	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					40.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	4	30	40.000.000	30	40.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****					30.000.000		36.000.000		48.000.000		60.000.000		75.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	1	2	30.000.000	2	36.000.000	2	48.000.000	2	60.000.000	2	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					150.000.000		165.000.000		175.000.000		187.000.000		192.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	4	150.000.000	4	165.000.000	4	175.000.000	4	187.000.000	4	192.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					60.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	9	8	60.000.000	8	75.000.000	8	100.000.000	8	125.000.000	8	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KELURAHAN KRANGGAN, AMBARAWA, SEMARANG OPD Provinsi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					2.681.800.000		2.699.300.000		24.620.800.000		27.923.800.000		13.004.800.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Magelang ***	%	100	100	2.681.800.000	100	2.699.300.000	100	24.620.800.000	100	27.923.800.000	100	13.004.800.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					770.000.000		902.000.000		912.000.000		922.000.000		922.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam rangka Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	770.000.000	4	902.000.000	4	912.000.000	4	922.000.000	4	922.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****					770.000.000		902.000.000		912.000.000		922.000.000		922.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	770.000.000	12	902.000.000	12	912.000.000	12	922.000.000	12	922.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					290.800.000		263.800.000		288.800.000		303.300.000		321.300.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam rangka Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sistem		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	290.800.000	100	263.800.000	100	288.800.000	100	303.300.000	100	321.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****					15.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000		15.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	15.000.000	4	10.000.000	4	11.000.000	4	12.000.000	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					20.000.000		15.000.000		25.000.000		20.000.000		25.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	20.000.000	4	15.000.000	4	25.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					15.000.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					125.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	125.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****					10.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		25.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	4	4	10.000.000	4	15.000.000	4	17.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****					5.000.000		0		5.000.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	40	5.000.000	N/A	0	35	5.000.000	50	7.500.000	50	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	400	300	15.000.000	300	15.000.000	400	20.000.000	400	20.000.000	400	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					72.000.000		75.000.000		77.000.000		80.000.000		85.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	72.000.000	12	75.000.000	12	77.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					13.800.000		13.800.000		13.800.000		13.800.000		13.800.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	3	3	13.800.000	3	13.800.000	3	13.800.000	3	13.800.000	3	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****					265.000.000		145.000.000		21.963.500.000		25.170.000.000		10.155.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	2	265.000.000	4	145.000.000	4	21.963.500.000	6	25.170.000.000	6	10.155.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Pengadaan Mebel *****					0		20.000.000		25.000.000		25.000.000		0	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	0	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					90.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	12	90.000.000	2	15.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****					0		0		150.000.000		0		0	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	1	150.000.000	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****					75.000.000		0		150.000.000		0		0	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	75.000.000	N/A	0	1	150.000.000	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					0		0		21.498.500.000		25.000.000.000		10.000.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	1	21.498.500.000	1	25.000.000.000	1	10.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					100.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000		125.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	2	100.000.000	2	110.000.000	2	115.000.000	2	120.000.000	2	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					911.000.000		941.500.000		981.500.000		1.051.500.000		1.131.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terpenuhinya penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	911.000.000	4	941.500.000	4	981.500.000	4	1.051.500.000	4	1.131.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					1.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	4	1.000.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****					310.000.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	310.000.000	4	325.000.000	4	350.000.000	4	375.000.000	4	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					0		0		0		25.000.000		30.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	4	25.000.000	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****					600.000.000		615.000.000		630.000.000		650.000.000		700.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	600.000.000	4	615.000.000	4	630.000.000	4	650.000.000	4	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					445.000.000		447.000.000		475.000.000		477.000.000		475.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka,, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Balai Kesehatan		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	6	9	445.000.000	9	447.000.000	9	475.000.000	9	477.000.000	9	475.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	9	9	55.000.000	9	60.000.000	9	65.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Mebel *****					5.000.000		7.000.000		10.000.000		10.000.000		0	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	5.000.000	10	7.000.000	N/A	10.000.000	15	10.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					45.000.000		40.000.000		45.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	2	7	45.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara *****	Unit	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					140.000.000		130.000.000		135.000.000		142.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	4	140.000.000	4	130.000.000	4	135.000.000	4	142.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					150.000.000		160.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					2.324.200.000		2.684.200.000		2.890.500.000		3.106.700.000		3.271.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten ***	%	100	100	2.324.200.000	100	2.684.200.000	100	2.890.500.000	100	3.106.700.000	100	3.271.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					580.000.000		700.000.000		710.000.000		720.000.000		720.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam rangka Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	580.000.000	4	700.000.000	4	710.000.000	4	720.000.000	4	720.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****					580.000.000		700.000.000		710.000.000		720.000.000		720.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	580.000.000	4	700.000.000	4	710.000.000	4	720.000.000	4	720.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					270.000.000		302.000.000		330.000.000		357.000.000		392.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam rangka Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sistem		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	270.000.000	100	302.000.000	100	330.000.000	100	357.000.000	100	392.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****					10.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					10.000.000		12.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	10.000.000	4	12.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	15.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					115.000.000		120.000.000		125.000.000		130.000.000		135.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	3	115.000.000	3	120.000.000	3	125.000.000	3	130.000.000	3	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****					10.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	12	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****					10.000.000		12.000.000		15.000.000		15.000.000		17.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	1	10.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					15.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		95.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	70.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					15.000.000		18.000.000		20.000.000		22.000.000		25.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	4	15.000.000	4	18.000.000	4	20.000.000	4	22.000.000	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****					120.000.000		235.000.000		315.000.000		410.000.000		440.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	2	3	120.000.000	3	235.000.000	3	315.000.000	3	410.000.000	3	440.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Pengadaan Mebel *****					20.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					50.000.000		80.000.000		100.000.000		130.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	2	50.000.000	2	80.000.000	2	100.000.000	2	130.000.000	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****					10.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	10.000.000	1	15.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****					25.000.000		0		0		0		0	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	25.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					0		100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					1.104.200.000		1.147.200.000		1.192.500.000		1.242.700.000		1.298.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Balai Kesehatan Wilayah Klaten		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	1.104.200.000	4	1.147.200.000	4	1.192.500.000	4	1.242.700.000	4	1.298.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					2.200.000		2.200.000		2.500.000		2.700.000		3.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	2.200.000	12	2.200.000	12	2.500.000	12	2.700.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****					320.000.000		350.000.000		385.000.000		425.000.000		470.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	320.000.000	12	350.000.000	12	385.000.000	12	425.000.000	12	470.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					0		0		0		0		0	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****					782.000.000		795.000.000		805.000.000		815.000.000		825.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	782.000.000	12	795.000.000	12	805.000.000	12	815.000.000	12	825.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					250.000.000		300.000.000		343.000.000		377.000.000		421.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	4	6	250.000.000	6	300.000.000	6	343.000.000	6	377.000.000	6	421.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					75.000.000		85.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	11	11	75.000.000	11	85.000.000	11	90.000.000	11	100.000.000	11	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Pemeliharaan Mebel *****					10.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					20.000.000		30.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	60	5	20.000.000	5	30.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	5	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****					15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****					20.000.000		30.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					90.000.000		95.000.000		98.000.000		102.000.000		116.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	4	3	90.000.000	3	95.000.000	3	98.000.000	3	102.000.000	3	116.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	4	3	20.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KLATEN OPD Provinsi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					5.139.000.000		5.996.000.000		6.594.000.000		7.190.000.000		7.777.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Pati		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati ***	%	100	100	5.139.000.000	100	5.996.000.000	100	6.594.000.000	100	7.190.000.000	100	7.777.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					1.010.000.000		1.130.000.000		1.141.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam rangka Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Balkesmas Wil. Pati		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	1.010.000.000	4	1.130.000.000	4	1.141.000.000	4	1.150.000.000	4	1.150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****					1.010.000.000		1.130.000.000		1.141.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	1.010.000.000	4	1.130.000.000	4	1.141.000.000	4	1.150.000.000	4	1.150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					1.325.000.000		1.521.000.000		1.717.000.000		1.913.000.000		2.109.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam rangka Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	1.325.000.000	100	1.521.000.000	100	1.717.000.000	100	1.913.000.000	100	2.109.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****					40.000.000		70.000.000		100.000.000		130.000.000		160.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	1	40.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	130.000.000	1	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					250.000.000		275.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	250.000.000	4	275.000.000	4	300.000.000	4	325.000.000	4	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	4	4	100.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000	4	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					350.000.000		375.000.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	350.000.000	4	375.000.000	4	400.000.000	4	425.000.000	4	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****					150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	4	4	150.000.000	4	175.000.000	4	200.000.000	4	225.000.000	4	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****					5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000	4	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	60.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	350.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG OPD Provinsi PATI PEKALONGAN PEMALA
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	2	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****					825.000.000		1.030.000.000		1.185.000.000		1.340.000.000		1.495.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Balkesmas Wil. Pati		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	2	3	825.000.000	3	1.030.000.000	3	1.185.000.000	3	1.340.000.000	3	1.495.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Pengadaan Mebel *****					25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	4	4	150.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****					100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****					100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					0		0		0		0		0	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	4	4	450.000.000	4	500.000.000	4	550.000.000	4	600.000.000	4	650.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					1.279.000.000		1.485.000.000		1.591.000.000		1.697.000.000		1.803.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Wilayah kerja Balkesmas Wilayah Pati		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	1.279.000.000	4	1.485.000.000	4	1.591.000.000	4	1.697.000.000	4	1.803.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4.000.000	4	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****					500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	12	650.000.000	12	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	25.000.000	4	30.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****					750.000.000		900.000.000		950.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	12	750.000.000	12	900.000.000	12	950.000.000	12	1.000.000.000	12	1.050.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					700.000.000		830.000.000		960.000.000		1.090.000.000		1.220.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di wilayah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	4	6	700.000.000	6	830.000.000	6	960.000.000	6	1.090.000.000	6	1.220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	10	10	200.000.000	10	250.000.000	10	300.000.000	10	350.000.000	10	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Pemeliharaan Mebel *****					20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000		200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	110	120	160.000.000	120	170.000.000	129	180.000.000	130	190.000.000	140	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****					70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	2	2	70.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	4	4	250.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	4	400.000.000	4	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					5.236.800.000		4.565.800.000		4.665.800.000		4.800.800.000		4.725.800.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelatihan Kesehatan		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan ***	%	100	100	5.236.800.000	100	4.565.800.000	100	4.665.800.000	100	4.800.800.000	100	4.725.800.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					568.800.000		593.800.000		593.800.000		628.800.000		628.800.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam rangka Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	568.800.000	100	593.800.000	100	593.800.000	100	628.800.000	100	628.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN KOTA SEMARANG OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					13.800.000		13.800.000		13.800.000		13.800.000		13.800.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	2	13.800.000	2	13.800.000	2	13.800.000	2	13.800.000	2	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****					936.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000		300.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Bapelkes		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	23	5	936.000.000	5	300.000.000	7	400.000.000	7	500.000.000	7	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Pengadaan Mebel *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					186.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	2	186.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****					0		0		100.000.000		0		0	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****					0		0		0		200.000.000		0	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	200.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					700.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	2	10	700.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					2.702.000.000		2.702.000.000		2.702.000.000		2.702.000.000		2.727.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Bapelkes		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	2.702.000.000	4	2.702.000.000	4	2.702.000.000	4	2.702.000.000	4	2.727.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****					700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	700.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					0		0		0		0		25.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****					1.992.000.000		1.992.000.000		1.992.000.000		1.992.000.000		1.992.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	1.992.000.000	4	1.992.000.000	4	1.992.000.000	4	1.992.000.000	4	1.992.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					1.030.000.000		970.000.000		970.000.000		970.000.000		1.070.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah meliputi Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Bapelkes		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	15	15	1.030.000.000	15	970.000.000	15	970.000.000	15	970.000.000	15	1.070.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	7	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Pemeliharaan Mebel *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****					0		0		0		0		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****					120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	1	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					560.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	3	560.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi SEMARANG WONOSOBO
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					9.628.500.000		9.938.000.000		10.026.000.000		10.143.000.000		10.218.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan ***	%	100	100	9.628.500.000	100	9.938.000.000	100	10.026.000.000	100	10.143.000.000	100	10.218.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					2.700.000.000		2.835.000.000		2.843.000.000		2.860.000.000		2.875.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam rangka Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	2.700.000.000	4	2.835.000.000	4	2.843.000.000	4	2.860.000.000	4	2.875.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****					2.700.000.000		2.835.000.000		2.843.000.000		2.860.000.000		2.875.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	2.700.000.000	4	2.835.000.000	4	2.843.000.000	4	2.860.000.000	4	2.875.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					915.000.000		935.000.000		935.000.000		935.000.000		945.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam rangka Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	915.000.000	100	935.000.000	100	935.000.000	100	935.000.000	100	945.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					190.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	190.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					145.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	145.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****					90.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	2	2	90.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****					5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	5.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	25.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DKI JAKARTA OPD Provinsi
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					30.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	4	4	30.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****					1.055.500.000		1.090.000.000		1.050.000.000		1.040.000.000		1.090.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Paket	4	4	1.055.500.000	4	1.090.000.000	4	1.050.000.000	4	1.040.000.000	4	1.090.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Pengadaan Mebel *****					85.500.000		90.000.000		50.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	85.500.000	1	90.000.000	1	50.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	15	20	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****					0		0		0		0		0	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****					70.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	1	1	70.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					3.480.000.000		3.480.000.000		3.580.000.000		3.690.000.000		3.690.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terpnuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	3.480.000.000	4	3.480.000.000	4	3.580.000.000	4	3.690.000.000	4	3.690.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					150.000.000		150.000.000		150.000.000		160.000.000		160.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****					1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****					1.500.000.000		1.500.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.600.000.000	1	1.600.000.000	1	1.600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					1.478.000.000		1.598.000.000		1.618.000.000		1.618.000.000		1.618.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	4	4	1.478.000.000	4	1.598.000.000	4	1.618.000.000	4	1.618.000.000	4	1.618.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	5	5	200.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Mebel *****					30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	60	30.000.000	60	30.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	50	60	500.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****					100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	4	4	400.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					230.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	4	4	230.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas kesehatan *								566.320.350.000		588.571.297.000		626.805.545.000		672.348.695.000		763.395.020.000	Dinas Kesehatan	
				Usia Harapan Hidup (UHH) *	Tahun	74,93	75,46		75,68		75,9		76,12		76,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak **							1.152.240.000		1.432.764.000		1.633.340.000		1.753.173.000		1.972.489.000	Dinas Kesehatan	
				Angka Kematian Ibu **	per 100.000 KH	74,7	78,27	980.240.000	77,21	1.260.764.000	76,32	1.453.340.000	75,6	1.565.173.000	74,87	1.777.489.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					45.740.000		50.314.000		55.345.000		60.879.000		66.966.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa ***	%	28,57	28,57	45.740.000	42,85	50.314.000	51,74	55.345.000	71,4	60.879.000	85,86	66.966.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					45.740.000		50.314.000		55.345.000		60.879.000		66.966.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa ****	%	N/A	28,57	45.740.000	42,85	50.314.000	57,14	55.345.000	71,4	60.879.000	85,86	66.966.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak *****					45.740.000		50.314.000		55.345.000		60.879.000		66.966.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak *****	Dokumen	4	4	45.740.000	4	50.314.000	4	55.345.000	4	60.879.000	4	66.966.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa BANJARNEGARA BATANG KENDAL KOTA SALATIGA SEMARANG TEMANGGUNG WONOSOBO
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					75.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang		Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang ***	%	28,57	28,57	75.000.000	42,85	150.000.000	57,14	200.000.000	57,14	200.000.000	57,14	250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					75.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang		Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang ****	%	N/A	28,57	75.000.000	42,85	150.000.000	57,14	200.000.000	57,14	200.000.000	71,42	250.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak *****					75.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak *****	Dokumen	N/A	4	75.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang BANYUMAS CILACAP KEBUMEN KOTA MAGELANG MAGELANG PURBALINGGA PURWOREJO
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					75.000.000		100.000.000		125.000.000		125.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten		Presentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten ***	%	N/A	28,57	75.000.000	42,86	100.000.000	57,14	125.000.000	57,14	125.000.000	71,42	150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					75.000.000		100.000.000		125.000.000		125.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten		Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten ****	%	N/A	30	75.000.000	40	100.000.000	50	125.000.000	60	125.000.000	70	150.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak *****					75.000.000		100.000.000		125.000.000		125.000.000		150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak *****	Dokumen	N/A	4	75.000.000	4	100.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten BOYOLALI KARANGANYAR KLATEN KOTA SURAKARTA SRAGEN SUKOHARJO WONOGIRI
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati		Persentase kabupaten/kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati ***	%	10	20	40.000.000	25	50.000.000	30	60.000.000	35	70.000.000	40	80.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati		Persentase Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati ****	%	N/A	30	40.000.000	40	50.000.000	50	60.000.000	60	70.000.000	70	80.000.000	SEKSI PELAYANAN	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak *****					40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak *****	Dokumen	4	4	40.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	SEKSI PELAYANAN	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati BLORA DEMAK GROBOGAN JEPARA KUDUS PATI REMBANG
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					554.500.000		660.450.000		702.995.000		739.294.000		780.523.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup		Persentase penurunan kasus kematian ibu ***	%	2	2	554.500.000	2	660.450.000	2	702.995.000	2	739.294.000	2	780.523.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					554.500.000		660.450.000		702.995.000		739.294.000		780.523.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Persentase ANC 6 Kali (K6) ****	%	74	82	85.000.000	85	85.000.000	87,5	90.000.000	90	95.000.000	90	100.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak *****					340.000.000		340.000.000		360.000.000		380.000.000		400.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (ANC 6 Kali) *****	Dokumen	N/A	4	85.000.000	4	85.000.000	4	90.000.000	4	95.000.000	4	100.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGGA PURWOREJO REMBAN
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		prevalensi anemia pada remaja putri ****	%	28	23	159.500.000	20	175.450.000	17	192.995.000	15	212.294.000	15	233.523.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif *****					319.000.000		350.900.000		385.990.000		424.588.000		467.046.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif *****	Dokumen	N/A	4	159.500.000	4	175.450.000	4	192.995.000	4	212.294.000	4	233.523.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGGA PURWOREJO REMBAN
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		prevalensi anemia pada ibu hamil ****	%	N/A	25	85.000.000	24	90.000.000	22	95.000.000	20	95.000.000	20	100.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak *****					340.000.000		360.000.000		380.000.000		380.000.000		400.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak *****	Dokumen	N/A	4	85.000.000	4	90.000.000	4	95.000.000	4	95.000.000	4	100.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KOTA MAGELANG KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGGA PURWOREJO REMBANG SEMARAN

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia ****	%	N/A	60	100.000.000	70	110.000.000	80	115.000.000	90	117.000.000	90	117.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif *****					200.000.000		220.000.000		230.000.000		234.000.000		234.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Skrening Pre Eklamsi) *****	Dokumen	N/A	4	100.000.000	4	110.000.000	4	115.000.000	4	117.000.000	4	117.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar ****	%	N/A	17,14	125.000.000	22,86	200.000.000	28,7	210.000.000	34,29	220.000.000	40	230.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan *****					625.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan *****	Dokumen	N/A	4	125.000.000	4	200.000.000	4	210.000.000	4	220.000.000	4	230.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					190.000.000		250.000.000		310.000.000		370.000.000		450.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota		Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit mencapai Case Fatality Rate Direct Obstetric (eklampsi dan perdarahan) < 1% ***	%	N/A	68,57	190.000.000	71,42	250.000.000	74,28	310.000.000	77,14	370.000.000	80	450.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					190.000.000		250.000.000		310.000.000		370.000.000		450.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
		Terpenuhinya penerbitan ijin RS Kelas B; fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi paripurna dan pelayanan RS untuk penurunan kematian ibu dan bayi		Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)sesuai standar ****	%	N/A	42,86	90.000.000	57,14	100.000.000	71,43	110.000.000	85,71	120.000.000	100	150.000.000	Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					180.000.000		200.000.000		220.000.000		240.000.000		300.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		"Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan" (RS PONEK) *****	Unit	N/A	20	90.000.000	30	100.000.000	40	110.000.000	50	120.000.000	60	150.000.000	Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGG

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya penerbitan ijin RS Kelas B; fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi paripurna dan pelayanan RS untuk penurunan kematian ibu dan bayi		Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan Audit Maternal Perinatal Surveilan Respon (AMPSR) sesuai standar ****	%	26,09	56,25	100.000.000	75	150.000.000	78,13	200.000.000	84,38	250.000.000	90	300.000.000	Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					200.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		"Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan" (AMPSR) *****	Unit	N/A	20	100.000.000	30	150.000.000	40	200.000.000	50	250.000.000	60	300.000.000	Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGG
				Angka Kematian Balita (AKABA) **	per 1000 KH	8,57	8,66	172.000.000	8,57	172.000.000	8,48	180.000.000	8,4	188.000.000	8,32	195.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					172.000.000		172.000.000		180.000.000		188.000.000		195.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup		Angka Kematian Bayi (AKB) ***	1.000/KH	7,57	7,5	172.000.000	7,39	172.000.000	7,33	180.000.000	7,28	188.000.000	7,23	195.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					172.000.000		172.000.000		180.000.000		188.000.000		195.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Angka kematian neonatal ****	1.000/KH	5,82	6,01	84.000.000	5,91	82.000.000	5,82	85.000.000	5,73	90.000.000	5,66	95.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak *****					336.000.000		328.000.000		340.000.000		360.000.000		380.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (Angka kematian Neonatal) *****	Dokumen	N/A	4	84.000.000	4	82.000.000	4	85.000.000	4	90.000.000	4	95.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JAWA TENGAH JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS PATI
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Cakupan skrining Bayi Baru Lahir ****	%	N/A	40	88.000.000	55	90.000.000	75	95.000.000	90	98.000.000	90	100.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak *****					352.000.000		360.000.000		380.000.000		392.000.000		400.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Cakupan Skrining Bayi Baru) *****	Dokumen	N/A	4	88.000.000	4	90.000.000	4	95.000.000	4	98.000.000	4	100.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	BREBES DEMAK MAGELANG WONOGIRI WONOSOBO
	Menurunnya penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM) **							4.146.070.000		4.674.219.000		5.159.360.000		5.669.496.000		6.111.564.000	Dinas Kesehatan	
				Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) **	%	22,8	34,3	1.318.570.000	40	1.566.619.000	45,7	1.770.180.000	51,4	1.958.648.000	57,1	2.181.282.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					146.070.000		160.619.000		176.680.000		194.148.000		213.782.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa ***	%	14,28	28,57	146.070.000	42,85	160.619.000	57,14	176.680.000	71,4	194.148.000	86,86	213.782.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					146.070.000		160.619.000		176.680.000		194.148.000		213.782.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa ****	%	N/A	28,57	146.070.000	42,85	160.619.000	57,14	176.680.000	71,4	194.148.000	85,86	213.782.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					292.140.000		321.238.000		353.360.000		388.296.000		427.564.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tuberkulosis Sesuai Standar di Balkesmas wilayah Ambarawa *****	Dokumen	4	4	146.070.000	4	160.619.000	4	176.680.000	4	194.148.000	4	213.782.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa BANJARNEGARA BATANG KENDAL KOTA SALATIGA SEMARANG TEMANGGUNG WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					100.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang		Persentase Kabupaten Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang ***	%	14,28	28,57	100.000.000	28,57	150.000.000	42,85	150.000.000	57,14	200.000.000	71,42	250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					100.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang		Persentase Kabupaten/Kota wilker Balkesmas Wilayah Magelng yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% ****	%	N/A	28,57	100.000.000	42,85	150.000.000	57,14	150.000.000	71,42	200.000.000	85,71	250.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					200.000.000		300.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tuberkulosis Sesuai Standar di Balkesmas wilayah Magelang *****	Dokumen	2	4	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang BANYUMAS CILACAP KEBUMEN KOTA MAGELANG MAGELANG PURBALINGGA PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					162.500.000		150.000.000		162.500.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten		Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten ***	%	N/A	28,57	162.500.000	28,57	150.000.000	42,86	162.500.000	42,86	200.000.000	57,14	200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					162.500.000		150.000.000		162.500.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten		Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% ****	%	N/A	28,57	162.500.000	42,86	150.000.000	42,86	162.500.000	57,14	200.000.000	57,14	200.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					325.000.000		300.000.000		325.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tuberkulosis Sesuai Standar di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten *****	Dokumen	4	4	162.500.000	4	150.000.000	4	162.500.000	4	200.000.000	4	200.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten BOYOLALI KARANGANYAR KLATEN KOTA SURAKARTA SRAGEN SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					175.000.000		188.000.000		191.000.000		192.500.000		192.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati		Persentase kabupaten/kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati ***	%	28,57	28,57	175.000.000	28,57	188.000.000	28,57	191.000.000	42,8	192.500.000	42,8	192.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					175.000.000		188.000.000		191.000.000		192.500.000		192.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati		Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati ****	%	N/A	28,57	175.000.000	42,85	188.000.000	57,14	191.000.000	57,14	192.500.000	71,42	192.500.000	SEKSI PELAYANAN	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					350.000.000		376.000.000		382.000.000		385.000.000		385.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar di Balkesmas wilayah Pati *****	Dokumen	4	4	175.000.000	4	188.000.000	4	191.000.000	4	192.500.000	4	192.500.000	SEKSI PELAYANAN	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati BLORA DEMAK GROBOGAN JEPARA KUDUS PATI REMBANG
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					735.000.000		918.000.000		1.090.000.000		1.172.000.000		1.325.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Cakupan penemuan kasus tuberkulosis ***	%	90	95	105.000.000	95	155.000.000	95	205.000.000	95	250.000.000	95	300.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					105.000.000		155.000.000		205.000.000		250.000.000		300.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kab/kota dengan penemuan kasus Tuberkulosis sebesar >= 90% ****	%	48,5	60	105.000.000	65,7	155.000.000	71,4	205.000.000	77,1	250.000.000	82,8	300.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					1.575.000.000		2.325.000.000		3.075.000.000		3.750.000.000		4.500.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Penemuan Tuberkulosis Sesuai Standar *****	Dokumen	4	4	105.000.000	4	155.000.000	4	205.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGG

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis ***	%	86	91	105.000.000	92	155.000.000	93	205.000.000	94	250.000.000	95	305.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					105.000.000		155.000.000		205.000.000		250.000.000		305.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kab/Kota dengan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis >= 90% ****	%	28,5	40	105.000.000	45,7	155.000.000	51,4	205.000.000	57,1	250.000.000	62,8	305.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					1.575.000.000		2.325.000.000		3.075.000.000		3.750.000.000		4.575.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Sesuai Standar *****	Dokumen	4	4	105.000.000	4	155.000.000	4	205.000.000	4	250.000.000	4	305.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGG

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Insidensi Human Immunodeficiency Virus (HIV) ***	%	7	8	100.000.000	8	120.000.000	9	140.000.000	9	145.000.000	9	160.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					100.000.000		120.000.000		140.000.000		145.000.000		160.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kab/Kota dengan penemuan kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) dengan terapi ARV >=90 % ****	%	20	31,43	100.000.000	37,14	120.000.000	42,86	140.000.000	48,57	145.000.000	48,57	160.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					1.500.000.000		1.800.000.000		2.100.000.000		2.175.000.000		2.400.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar *****	Dokumen	4	4	100.000.000	4	120.000.000	4	140.000.000	4	145.000.000	4	160.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGG

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi malaria ***	Kabupaten/Kota	34	35	100.000.000	35	100.000.000	35	120.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					100.000.000		100.000.000		120.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Prosentase Kabupaten/Kota mencapai Positivity Rate (PR) Malaria <5% ****	%	17,1	28,6	100.000.000	34,3	100.000.000	40	120.000.000	45,7	100.000.000	48,6	100.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					1.500.000.000		1.500.000.000		1.800.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar *****	Dokumen	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	120.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGGA PURWORE

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Neglected Tropical Diseases (Pengendalian Kasus Filariasis dan Kusta) ***	Kabupaten/Kota	17	20	165.000.000	23	193.000.000	25	220.000.000	26	247.000.000	28	275.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					165.000.000		193.000.000		220.000.000		247.000.000		275.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Jumlah Kab/kota yang melaksanakan TAS Filariasis sesuai dengan target ****	Kabupaten/Kota	1	3	65.000.000	2	68.000.000	2	70.000.000	1	72.000.000	1	75.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					975.000.000		1.020.000.000		1.050.000.000		1.080.000.000		1.125.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar *****	Dokumen	4	4	65.000.000	4	68.000.000	4	70.000.000	4	72.000.000	4	75.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGGA PURWOREJO REMBAN

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kab/kota dengan RFT (Release From Treatment) >90% ****	%	65,71	71,43	100.000.000	74,29	125.000.000	77,14	150.000.000	80	175.000.000	80	200.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					1.500.000.000		1.875.000.000		2.250.000.000		2.625.000.000		3.000.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar *****	Dokumen	4	4	100.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000	4	200.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGG
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Angka kematian Dengue ***	%	1,3	0,5	100.000.000	0,4	125.000.000	0,4	125.000.000	0,3	100.000.000	0,3	100.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					100.000.000		125.000.000		125.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pencegahan dengue ****	%	N/A	50	100.000.000	60	125.000.000	70	125.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					1.500.000.000		1.875.000.000		1.875.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Dengue sesuai standar *****	Dokumen	4	4	100.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	BANJARNEGARA BANYUMAS BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGGA PURWORE
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Insidensi Hepatitis B ***	%	1,18	1,1	60.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	0,95	80.000.000	0,95	85.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					60.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan screning Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil >80% ****	%	50,14	62,8	60.000.000	62,8	70.000.000	68,57	75.000.000	74,28	80.000.000	74,28	85.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					900.000.000		1.050.000.000		1.125.000.000		1.200.000.000		1.275.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Hepatitis B sesuai standar *****	Dokumen	2	4	60.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	80.000.000	4	85.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGG
				Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) **	%	N/A	52	2.827.500.000	54	3.107.600.000	56	3.389.180.000	58	3.710.848.000	60	3.930.282.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					146.000.000		160.600.000		176.680.000		194.348.000		213.782.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50% ***	%	28,57	28,57	146.000.000	42,85	160.600.000	57,14	176.680.000	71,4	194.348.000	85,86	213.782.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					146.000.000		160.600.000		176.680.000		194.348.000		213.782.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan Jiwa & Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa ****	%	N/A	28,57	146.000.000	42,85	160.600.000	57,14	176.680.000	71,4	194.348.000	85,86	213.782.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					292.000.000		321.200.000		353.360.000		388.696.000		427.564.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****	Dokumen	4	4	146.000.000	4	160.600.000	4	176.680.000	4	194.348.000	4	213.782.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa BANJARNEGARA BATANG KENDAL KOTA SALATIGA SEMARANG TEMANGGUNG WONOSOBO
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					125.000.000		150.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang		Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang yang melaksanakan skrining Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50% ***	%	57,14	71,42	125.000.000	71,42	150.000.000	85,71	200.000.000	85,71	225.000.000	85,71	250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					125.000.000		150.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang		Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa & Penyakit Tidak Menular Prioritas minimal 50% ****	%	N/A	57,14	125.000.000	71,42	150.000.000	85,71	200.000.000	85,71	225.000.000	85,71	250.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					250.000.000		300.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****	Dokumen	4	4	125.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	225.000.000	4	250.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang BANYUMAS CILACAP KEBUMEN KOTA MAGELANG MAGELANG PURBALINGGA PURWOREJO
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					162.500.000		150.000.000		162.500.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten		Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan skrining Kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50% ***	%	N/A	57,14	162.500.000	71,42	150.000.000	85,71	162.500.000	85,71	200.000.000	85,71	200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					162.500.000		150.000.000		162.500.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten		Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa dan penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% ****	%	N/A	28,57	162.500.000	42,86	150.000.000	57,14	162.500.000	57,14	200.000.000	71,42	200.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					325.000.000		300.000.000		325.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****	Dokumen	4	4	162.500.000	4	150.000.000	4	162.500.000	4	200.000.000	4	200.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten BOYOLALI KARANGANYAR KLATEN SRAGEN SUKOHARJO WONOGIRI
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					175.000.000		188.000.000		191.000.000		192.500.000		192.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati		Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50% ***	%	28,57	28,57	175.000.000	28,57	188.000.000	28,57	191.000.000	42,8	192.500.000	42,8	192.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					175.000.000		188.000.000		191.000.000		192.500.000		192.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati		Persenatase Kabupaten/Kota dengan 80% Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menyelenggarakan skrining kesehatan jiwa (Keswa) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati ****	%	N/A	28,57	175.000.000	42,85	188.000.000	57,14	191.000.000	57,14	192.500.000	71,42	192.500.000	SEKSI PELAYANAN	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					350.000.000		376.000.000		382.000.000		385.000.000		385.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****	Dokumen	4	4	175.000.000	4	188.000.000	4	191.000.000	4	192.500.000	4	192.500.000	SEKSI PELAYANAN	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati BLORA DEMAK GROBOGAN JEPARA KUDUS PATI REMBANG
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					964.000.000		1.114.000.000		1.234.000.000		1.374.000.000		1.494.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup		Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja ***	%	N/A	54,28	400.000.000	60	510.000.000	65,71	620.000.000	71,42	730.000.000	77,14	840.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					400.000.000		510.000.000		620.000.000		730.000.000		840.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja di tempat kerja formal dan di tempat kerja Informal ****	%	N/A	51,4	250.000.000	54,28	310.000.000	57,14	370.000.000	60	430.000.000	62,85	490.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga *****					500.000.000		620.000.000		740.000.000		860.000.000		980.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja *****	Dokumen	1	4	250.000.000	4	310.000.000	4	370.000.000	4	430.000.000	4	490.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Persentase Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan pengukuran kebugaran ****	%	N/A	40	150.000.000	50	200.000.000	60	250.000.000	70	300.000.000	80	350.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga *****					300.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kesehatan Olahraga *****	Dokumen	N/A	4	150.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGGA PURW
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup		Persentase lanjut usia yang mandiri ***	%	90,22	77	30.000.000	79	40.000.000	81	50.000.000	83	60.000.000	85	70.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Persentase Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ****	%	93,64	55	30.000.000	60	40.000.000	65	50.000.000	70	60.000.000	75	70.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut *****					30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut *****	Dokumen	N/A	4	30.000.000	4	40.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGGA PURWORE
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup		Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) ***	%	N/A	40	534.000.000	50	564.000.000	60	564.000.000	70	584.000.000	80	584.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					534.000.000		564.000.000		564.000.000		584.000.000		584.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan aktivitas fisik ****	%	N/A	22	100.000.000	24	130.000.000	26	130.000.000	28	150.000.000	30	150.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan *****					500.000.000		650.000.000		650.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Assesment Aktifitas Fisik Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) *****	Dokumen	N/A	4	100.000.000	4	130.000.000	4	130.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Persentase depresi yang medapatkan layanan ****	%	N/A	1	434.000.000	1,5	434.000.000	2	434.000.000	2	434.000.000	2,5	434.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) *****					434.000.000		434.000.000		434.000.000		434.000.000		434.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) *****	Dokumen	2	4	434.000.000	4	434.000.000	4	434.000.000	4	434.000.000	4	434.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					455.000.000		545.000.000		625.000.000		725.000.000		780.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Persentase Hipertensi dalam pengendalian ***	%	30	35	145.400.000	37	190.610.000	39	215.340.000	41	239.616.000	43	255.828.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					145.400.000		190.610.000		215.340.000		239.616.000		255.828.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Hipertensi sesuai standar ****	%	N/A	20	61.160.000	25,71	94.450.000	31,43	109.270.000	37,14	128.934.000	42,86	139.463.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					917.400.000		1.416.750.000		1.639.050.000		1.934.010.000		2.091.945.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Pengendalian Hipertensi sesuai standar *****	Dokumen	4	4	61.160.000	4	94.450.000	4	109.270.000	4	128.934.000	4	139.463.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	BANJARNEGARA BANYUMAS Bidang Penanggulangan Penyakit

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Skrining kolesterol pada 80% Puskesmas ****	%	N/A	31,43	42.120.000	37,14	48.080.000	42,85	53.035.000	48,57	55.342.000	54,29	58.182.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					631.800.000		721.200.000		795.525.000		830.130.000		872.730.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Skrining kolesterol pada 80% Puskesmas *****	Dokumen	4	4	42.120.000	4	48.080.000	4	53.035.000	4	55.342.000	4	58.182.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Koordinasi dengan 35 kabupaten/kota, JAWA TENGAH
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		persentase kabupaten/kota dengan capaian skrining stroke minimal 30% ****	%	N/A	48,57	42.120.000	54,28	48.080.000	60	53.035.000	65,71	55.340.000	71,42	58.183.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					631.800.000		721.200.000		795.525.000		830.100.000		872.745.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil persentase kabupaten/kota dengan capaian skrining stroke minimal 30% *****	Dokumen	4	4	42.120.000	4	48.080.000	4	53.035.000	4	55.340.000	4	58.183.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Koordinasi dengan 35 kabupaten/kota, JAWA TENGAH
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Persentase Diabetes Melitus terkendali (DM Terkendali) ***	%	30	35	81.660.000	37	94.450.000	39	109.275.000	41	128.934.000	43	139.463.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					81.660.000		94.450.000		109.275.000		128.934.000		139.463.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Diabetes Melitus sesuai standar ****	%	20	31,43	81.660.000	37,14	94.450.000	42,85	109.275.000	48,57	128.934.000	54,29	139.463.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					1.224.900.000		1.416.750.000		1.639.125.000		1.934.010.000		2.091.945.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Pengendalian Diabetes Melitus sesuai standar *****	Dokumen	4	4	81.660.000	4	94.450.000	4	109.275.000	4	128.934.000	4	139.463.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG Bidang Penanggulangan Penyakit BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN<b
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun ***	%	N/A	14,4	83.660.000	13,4	94.450.000	12,4	109.275.000	11,4	128.934.000	10,4	139.463.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					83.660.000		94.450.000		109.275.000		128.934.000		139.463.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) ****	%	54,29	60	83.660.000	62,86	94.450.000	65,71	109.275.000	68,57	128.934.000	71,43	139.463.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					1.254.900.000		1.416.750.000		1.639.125.000		1.934.010.000		2.091.945.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan skrinning merokok pada anak sekolah (usia 10-21 th) *****	Dokumen	4	4	83.660.000	4	94.450.000	4	109.275.000	4	128.934.000	4	139.463.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Koordinasi dengan 35 kabupaten/kota, JAWA TENGAH
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks) ***	%	14,28	25,71	81.660.000	31,43	94.450.000	37,14	109.275.000	42,86	128.934.000	48,57	139.463.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					81.660.000		94.450.000		109.275.000		128.934.000		139.463.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kabupaten/Kota dengan faskes yang menyelenggarakan Skrining Kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks) ****	%	N/A	20	81.660.000	25,71	94.450.000	31,42	109.275.000	37,14	128.934.000	42,85	139.463.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					1.224.900.000		1.416.750.000		1.639.125.000		1.934.010.000		2.091.945.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Skrining Kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks) *****	Dokumen	4	4	81.660.000	4	94.450.000	4	109.275.000	4	128.934.000	4	139.463.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Koordinasi dengan 35 kabupaten/kota, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun ***	%	N/A	25	62.620.000	25	71.040.000	25	81.835.000	25	98.582.000	25	105.783.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					62.620.000		71.040.000		81.835.000		98.582.000		105.783.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase kabupaten/kota yang memiliki proporsi obesitas <23,4% ****	%	57	59	62.620.000	60	71.040.000	61	81.835.000	62	98.582.000	63	105.783.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					939.300.000		1.065.600.000		1.227.525.000		1.478.730.000		1.586.745.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Skrinning obesitas melalui pegukuran IMT (Indeks Masa Tubuh) atau LP (Lingkar Perut) *****	Dokumen	4	4	62.620.000	4	71.040.000	4	81.835.000	4	98.582.000	4	105.783.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Koordinasi dengan 35 kabupaten/kota, JAWA TENGAH
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ***					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Meningkatnya kabupaten/kota yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat ***	%	N/A	34,28	800.000.000	40	800.000.000	45,71	800.000.000	51,42	800.000.000	57,14	800.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ****					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor		Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif ****	%	N/A	57,14	500.000.000	62,85	500.000.000	68,57	500.000.000	80	500.000.000	80	500.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****	Dokumen	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	Kegiatan berkoordinasi dengan 35 Kab/Kota, JAWA TENGAH
			Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi ****					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kampanye pembudayaan hidup sehat ****	%	N/A	50	300.000.000	60	300.000.000	70	300.000.000	80	300.000.000	80	300.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat *****					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat *****	Dokumen	4	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	Koordinasi dengan 35 Kab/Kota, JAWA TENGAH
	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar **							158.691.300.000		179.530.000.000		205.360.500.000		249.618.647.000		289.776.500.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar **	%	N/A	28,57	158.691.300.000	34,28	179.530.000.000	40	205.360.500.000	45,71	249.618.647.000	51,43	289.776.500.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					47.682.000.000		48.240.000.000		48.800.000.000		49.370.000.000		49.950.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)		Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar ***	%	80	85	47.300.000.000	88	47.850.000.000	92	48.400.000.000	95	48.950.000.000	96	49.500.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					47.300.000.000		47.850.000.000		48.400.000.000		48.950.000.000		49.500.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Tersedianya dan terdistribusinya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan dalam rangka pemenuhan obat, BHP, BMHP, Vaksin, makanan dan minuman		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang memiliki obat-obatan (termasuk vaksin) sesuai standar ****	%	80	85	47.290.000.000	88	47.840.000.000	92	48.390.000.000	95	48.940.000.000	96	49.490.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan *****					300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan *****	Dokumen	2	2	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	2	500.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					93.980.000.000		94.980.000.000		95.980.000.000		96.980.000.000		97.980.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	9	9	46.990.000.000	9	47.490.000.000	9	47.990.000.000	9	48.490.000.000	9	48.990.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Tersedianya dan terdistribusinya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan dalam rangka pemenuhan obat, BHP, BMHP, Vaksin, makanan dan minuman		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan yang memiliki obat-obatan sesuai standar ****	%	80	85	10.000.000	88	10.000.000	92	10.000.000	95	10.000.000	96	10.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Faskes Lanjutan) *****	Dokumen	7	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)		Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional ***	%	59,12	63,05	382.000.000	66,02	390.000.000	68,08	400.000.000	70,01	420.000.000	72,07	450.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi ****					382.000.000		390.000.000		400.000.000		420.000.000		450.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase fasilitas kesehatan yang terkoneksi ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional ****	%	71,17	76,16	332.000.000	79,14	340.000.000	82,12	350.000.000	85,16	370.000.000	88,14	400.000.000	Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan *****					664.000.000		680.000.000		700.000.000		740.000.000		800.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan *****	Dokumen	N/A	4	332.000.000	4	340.000.000	4	350.000.000	4	370.000.000	4	400.000.000	Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi	Bidang Sumber Daya Kesehatan JAWA TENGAH
		Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional ****	%	13,2	17	50.000.000	19	50.000.000	21	50.000.000	23	50.000.000	25	50.000.000	Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan *****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (masyarakat terpantau kesehatannya melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional) *****	Dokumen	N/A	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi	Bidang Sumber Daya Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					55.013.000.000		5.540.000.000		33.325.000.000		19.425.000.000		14.525.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Persentase mutu layanan Balkesmas Wilayah Ambarawa sesuai standar ***	%	100	100	55.013.000.000	100	5.540.000.000	100	33.325.000.000	100	19.425.000.000	100	14.525.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					54.230.000.000		4.740.000.000		32.475.000.000		18.525.000.000		13.575.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; pengadaan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman; pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medis, dan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Mahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien ****	%	100	100	1.770.000.000	100	1.790.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	3.000.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					1.770.000.000		1.790.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	4	4	1.770.000.000	4	1.790.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	3.000.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa SEMARANG
		Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; pengadaan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman; pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medis, dan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balkesmas Wilayah Ambarawa ****	%	100	100	2.460.000.000	100	2.450.000.000	100	10.475.000.000	100	6.525.000.000	100	5.575.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya *****					300.000.000		350.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar *****	Unit	N/A	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	375.000.000	2	400.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa SEMARANG
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					2.000.000.000		2.000.000.000		10.000.000.000		6.000.000.000		5.000.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	6	2.000.000.000	8	2.000.000.000	8	10.000.000.000	8	6.000.000.000	8	5.000.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa SEMARANG
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					160.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar *****	Unit	2	2	160.000.000	2	100.000.000	2	125.000.000	2	150.000.000	2	175.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa SEMARANG
		Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; pengadaan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman; pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medis, dan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit ****	%	N/A	30	50.000.000.000	50	500.000.000	100	20.000.000.000	100	10.000.000.000	100	5.000.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	
			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya *****					50.000.000.000		500.000.000		20.000.000.000		10.000.000.000		5.000.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 *****	Unit	N/A	1	50.000.000.000	1	500.000.000	1	20.000.000.000	1	10.000.000.000	1	5.000.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa SEMARANG
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					783.000.000		800.000.000		850.000.000		900.000.000		950.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terwujudnya penerbitan ijin RS Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka peningkatan mutu Balkesmas WIlayah Ambarawa		Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balkesmas Wilayah Ambarawa ****	%	100	100	783.000.000	100	800.000.000	100	850.000.000	100	900.000.000	100	950.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					783.000.000		800.000.000		850.000.000		900.000.000		950.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan *****	Unit	4	4	783.000.000	4	800.000.000	4	850.000.000	4	900.000.000	4	950.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa SEMARANG
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					2.640.000.000		3.230.000.000		3.490.000.000		3.910.000.000		29.860.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang		Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang sesuai standar ***	%	100	100	2.640.000.000	100	3.230.000.000	100	3.490.000.000	100	3.910.000.000	100	29.860.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					1.940.000.000		2.230.000.000		2.490.000.000		2.910.000.000		29.160.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; pengadaan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman; pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medis, dan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang		Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang ****	%	100	100	1.400.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.500.000.000	100	1.800.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					1.400.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.500.000.000		1.800.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	4	5	1.400.000.000	6	1.300.000.000	6	1.300.000.000	6	1.500.000.000	6	1.800.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang KOTA MAGELANG
		Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; pengadaan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman; pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medis, dan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang ****	%	N/A	N/A	540.000.000	75	630.000.000	80	590.000.000	85	410.000.000	90	360.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya *****					180.000.000		220.000.000		150.000.000		150.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar *****	Unit	N/A	2	180.000.000	1	220.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang KOTA MAGELANG
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					300.000.000		350.000.000		350.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	4	300.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang KOTA MAGELANG
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					60.000.000		60.000.000		90.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar *****	Unit	2	2	60.000.000	2	60.000.000	2	90.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang KOTA MAGELANG
		Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; pengadaan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman; pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medis, dan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang		Persentase pembangunan fasilitas rumah sakit ****	%	N/A	N/A	0	20	300.000.000	30	600.000.000	50	1.000.000.000	100	27.000.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya *****					0		300.000.000		600.000.000		1.000.000.000		27.000.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 *****	Unit	N/A	N/A	0	1	300.000.000	1	600.000.000	1	1.000.000.000	1	27.000.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang KOTA MAGELANG
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					700.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		700.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terwujudnya penerbitan izin Rumah Sakit Kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang		Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang ****	%	100	100	700.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	700.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					700.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		700.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan *****	Unit	4	5	700.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	700.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang KOTA MAGELANG
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					6.080.000.000		6.700.000.000		7.925.000.000		12.650.000.000		14.825.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten		Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten sesuai standar ***	%	N/A	60	6.080.000.000	65	6.700.000.000	70	7.925.000.000	75	12.650.000.000	80	14.825.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					5.080.000.000		5.700.000.000		6.825.000.000		11.250.000.000		13.325.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; pengadaan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman; pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medis, dan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten		Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten ****	%	N/A	70	2.780.000.000	75	2.900.000.000	80	3.625.000.000	85	6.250.000.000	90	7.325.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya *****					280.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar *****	Unit	N/A	2	280.000.000	2	300.000.000	2	325.000.000	2	350.000.000	2	375.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten KLATEN
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					2.000.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		5.000.000.000		6.000.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.500.000.000	10	5.000.000.000	10	6.000.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten KLATEN
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					500.000.000		600.000.000		800.000.000		900.000.000		950.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar *****	Unit	2	2	500.000.000	2	600.000.000	2	800.000.000	2	900.000.000	2	950.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten KLATEN
		Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; pengadaan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman; pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medis, dan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten		Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten ****	%	N/A	100	1.800.000.000	100	2.000.000.000	100	2.200.000.000	100	3.000.000.000	100	3.500.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					1.800.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	4	4	1.800.000.000	4	2.000.000.000	4	2.200.000.000	4	3.000.000.000	4	3.500.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten KLATEN

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; pengadaan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman; pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medis, dan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten		Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit ****	%	N/A	10	500.000.000	30	800.000.000	50	1.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.500.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya *****					500.000.000		800.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 *****	Unit	N/A	1	500.000.000	1	800.000.000	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.500.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten KLATEN
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					1.000.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terwujudnya penerbitan ijin RS Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka peningkatan mutu Balkesmas Wllayah Klaten		Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten ****	%	N/A	85	1.000.000.000	87	1.000.000.000	89	1.100.000.000	91	1.400.000.000	95	1.500.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					1.000.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan *****	Unit	N/A	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.100.000.000	4	1.400.000.000	4	1.500.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten KLATEN

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					7.000.000.000		97.800.000.000		93.400.000.000		144.692.647.000		159.300.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati		Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati sesuai standar ***	%	100	100	7.000.000.000	100	97.800.000.000	100	93.400.000.000	100	144.692.647.000	100	159.300.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					5.500.000.000		96.050.000.000		33.400.000.000		79.692.647.000		89.300.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; pengadaan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman; pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medis, dan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati		Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati ****	%	100	100	3.300.000.000	100	10.450.000.000	100	3.100.000.000	100	28.592.647.000	100	35.900.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya *****					100.000.000		200.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar *****	Unit	N/A	2	100.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	2	400.000.000	2	500.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati PATI
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					3.000.000.000		10.000.000.000		2.500.000.000		27.842.647.000		35.000.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan *****	Unit	2	10	3.000.000.000	10	10.000.000.000	10	2.500.000.000	10	27.842.647.000	10	35.000.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati PATI
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar *****	Unit	4	4	200.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	4	400.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati PATI
		Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; pengadaan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman; pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medis, dan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati		Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati ****	Unit	100	100	700.000.000	100	900.000.000	100	1.300.000.000	100	1.100.000.000	100	3.400.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					700.000.000		900.000.000		1.300.000.000		1.100.000.000		3.400.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	4	4	700.000.000	4	900.000.000	4	1.300.000.000	4	1.100.000.000	4	3.400.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati PATI
		Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; pengadaan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, makanan dan minuman; pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medis, dan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati		Persentase pembangunan fasilitas Rumah Sakit (RS) ****	Unit	N/A	2	1.500.000.000	1	84.700.000.000	1	29.000.000.000	1	50.000.000.000	1	50.000.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya *****					1.500.000.000		84.700.000.000		29.000.000.000		50.000.000.000		50.000.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 *****	Unit	N/A	1	1.500.000.000	1	84.700.000.000	1	29.000.000.000	1	50.000.000.000	1	50.000.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati PATI
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					1.500.000.000		1.750.000.000		60.000.000.000		65.000.000.000		70.000.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terwujudnya penerbitan ijin RS Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka peningkatan mutu Balkesmas Wllayah Pati		Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati ****	%	100	100	1.500.000.000	100	1.750.000.000	100	60.000.000.000	100	65.000.000.000	100	70.000.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					1.500.000.000		1.750.000.000		60.000.000.000		65.000.000.000		70.000.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan *****	Unit	4	4	1.500.000.000	4	1.750.000.000	4	60.000.000.000	4	65.000.000.000	4	70.000.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati PATI
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					275.000.000		370.000.000		460.000.000		530.000.000		645.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup		Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Fasilitas pelayanan kesehatan Primer dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai Standar ***	%	N/A	51,19	35.000.000	51,76	50.000.000	52,33	85.000.000	52,89	100.000.000	53,46	140.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					35.000.000		50.000.000		85.000.000		100.000.000		140.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Persentase Fasyankes Primer yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar ****	%	N/A	51,19	35.000.000	51,75	50.000.000	52,32	85.000.000	52,89	100.000.000	53,46	140.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan *****					175.000.000		250.000.000		425.000.000		500.000.000		700.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA)Puskesmas *****	Dokumen	N/A	4	35.000.000	4	50.000.000	4	85.000.000	4	100.000.000	4	140.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup		Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas pelayanan kesehatan Primer terakreditasi paripurna ***	%	N/A	85,71	165.000.000	88,57	220.000.000	91,43	250.000.000	100	280.000.000	100	330.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					165.000.000		220.000.000		250.000.000		280.000.000		330.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Presentase Fasyankes Primer terakreditasi minimal paripurna ****	%	N/A	94,87	75.000.000	94,87	100.000.000	95,41	120.000.000	100	150.000.000	100	170.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan *****					375.000.000		500.000.000		600.000.000		750.000.000		850.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Mutu Pelayanan Puskesmas dan Labkesmas *****	Dokumen	N/A	40	75.000.000	50	100.000.000	60	120.000.000	70	150.000.000	70	170.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Persentase Kabupaten/Kota menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) ****	%	14,28	48,57	90.000.000	71,42	120.000.000	87,71	130.000.000	100	130.000.000	100	160.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan *****					450.000.000		600.000.000		650.000.000		650.000.000		800.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Jumlah dokumen pembinaan Integrasi Layanan Primer (ILP) *****	Dokumen	N/A	4	90.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000	4	130.000.000	4	160.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup		Persentase Kabupaten/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu ***	%	N/A	37,14	75.000.000	48,57	100.000.000	57,14	125.000.000	71,42	150.000.000	82,85	175.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Persentase Kabupaten/ Kota dengan tata kelola kesehatan tradisional yang baik ****	Dokumen	N/A	37,14	75.000.000	48,57	100.000.000	57,14	125.000.000	71,42	150.000.000	82,85	175.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya *****	Dokumen	N/A	4	75.000.000	4	100.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					1.235.000.000		1.270.000.000		1.220.000.000		1.340.000.000		1.335.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai standar ***	%	N/A	41,27	1.060.000.000	55,55	1.080.000.000	69,84	1.020.000.000	84,13	1.120.000.000	100	1.110.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					500.000.000		500.000.000		420.000.000		500.000.000		470.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
		Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar untuk mendukung layanan prioritas dan layanan disabilitas		Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar ****	%	N/A	60	500.000.000	70	500.000.000	75	420.000.000	80	500.000.000	85	470.000.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya *****					500.000.000		500.000.000		420.000.000		500.000.000		470.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar *****	Unit	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Koordinasi dengan 35 kabupaten / kota, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar (layanan prioritas) *****	Unit	N/A	5	100.000.000	7	100.000.000	8	120.000.000	10	150.000.000	12	120.000.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Koordinasi dengan 35 Kabupaten/Kota , JAWA TENGAH
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar (ramah disabilitas) *****	Unit	N/A	5	100.000.000	8	100.000.000	10	100.000.000	12	150.000.000	15	150.000.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Koordinasi dengan 35 Kabupaten/kota , JAWA TENGAH
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar (Layanan KJSU) *****	Unit	N/A	3	200.000.000	5	200.000.000	7	100.000.000	9	100.000.000	12	100.000.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Koordinasi dengan 35 Kabupaten/Kota , JAWA TENGAH
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Jumlah Fasilitas Kesehatan Non Pemerintah yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar *****	Unit	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Koordinasi dengan 35 Kabupaten/kota , JAWA TENGAH
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					560.000.000		580.000.000		600.000.000		620.000.000		640.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
		Tersedianya Layanan untuk pemenuhan fasilitas kesehatan rujukan sesuai ketentuan dan kepesertaan aktif jaminan kesehatan masyarakat		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan ****	%	N/A	40	560.000.000	50	580.000.000	60	600.000.000	70	620.000.000	75	640.000.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) *****					560.000.000		580.000.000		600.000.000		620.000.000		640.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) *****	Unit	N/A	7	110.000.000	9	120.000.000	11	130.000.000	13	140.000.000	15	150.000.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Kegiatan yang diperlukan dukungan Tim Kesehatan Provinsi *****	Kegiatan	N/A	30	450.000.000	45	460.000.000	60	470.000.000	75	480.000.000	90	490.000.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG Bidang Kesehatan Lanjutan BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN<b
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota		Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan terakreditasi paripurna ***	%	N/A	57,14	175.000.000	60	190.000.000	60	200.000.000	62,86	220.000.000	62,86	225.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					175.000.000		190.000.000		200.000.000		220.000.000		225.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya penerbitan ijin RS Kelas B; fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi paripurna dan pelayanan RS untuk penurunan kematian ibu dan bayi		Persentase Faskes Lanjutan dengan akreditasi minimal paripurna ****	%	N/A	57,72	175.000.000	59,17	190.000.000	59,95	200.000.000	60,96	220.000.000	60,96	225.000.000	Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan *****					175.000.000		190.000.000		200.000.000		220.000.000		225.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya *****	Unit	25	35	175.000.000	40	190.000.000	45	200.000.000	50	220.000.000	50	225.000.000	Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	KOTA SEMARANG
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					35.020.000.000		12.035.000.000		12.295.000.000		12.655.000.000		13.690.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Meningkatnya mutu layanan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar		Persentase Kabupaten/Kota dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar ***	%	14	54	725.000.000	68	725.000.000	82	725.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					725.000.000		725.000.000		725.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terwujudnya penerbitan ijin Rumah Sakit Kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan		Persentase Peningkatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar ****	%	14	54	725.000.000	68	725.000.000	82	725.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					725.000.000		725.000.000		725.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan *****	Unit	5	19	725.000.000	24	725.000.000	29	725.000.000	35	750.000.000	35	750.000.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGG
		Meningkatnya mutu layanan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar		Persentase mutu layanan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sesuai standar ***	%	70	72	29.295.000.000	73	6.810.000.000	78	7.570.000.000	83	8.305.000.000	83	9.340.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					29.295.000.000		6.810.000.000		7.570.000.000		8.305.000.000		9.340.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman, Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Fasilitas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan		Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman, Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Fasilitas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan ****	%	70	72	29.295.000.000	73	6.810.000.000	78	7.570.000.000	83	8.305.000.000	83	9.340.000.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya *****					24.000.000.000		0		0		0		0	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun *****	Unit	N/A	1	24.000.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	KOTA SEMARANG
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya *****					2.000.000.000		2.250.000.000		2.500.000.000		2.750.000.000		3.000.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar *****	Unit	20	20	2.000.000.000	4	2.250.000.000	2	2.500.000.000	2	2.750.000.000	2	3.000.000.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					0		1.000.000.000		1.250.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	5	1.000.000.000	5	1.250.000.000	12	1.500.000.000	14	2.000.000.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan KOTA SEMARANG
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					250.000.000		260.000.000		270.000.000		280.000.000		290.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar *****	Unit	5	63	250.000.000	68	260.000.000	73	270.000.000	78	280.000.000	83	290.000.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan KOTA SEMARANG
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					3.045.000.000		3.300.000.000		3.550.000.000		3.775.000.000		4.050.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	17	17	3.045.000.000	17	3.300.000.000	17	3.550.000.000	17	3.775.000.000	17	4.050.000.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	KOTA SEMARANG
		Meningkatnya mutu layanan kalibrasi di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan		Persentase Kabupaten/Kota yang terlayani pelayanan laboratorium dan kalibrasi diBalai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan ***	%	20	25	5.000.000.000	25	4.500.000.000	30	4.000.000.000	30	3.600.000.000	35	3.600.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					5.000.000.000		4.500.000.000		4.000.000.000		3.600.000.000		3.600.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi di Fasilitas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan		Jumlah Pengadaan dan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi di Fasilitas Layanan Kesehatan ****	Unit	N/A	27	5.000.000.000	40	4.500.000.000	35	4.000.000.000	30	3.600.000.000	30	3.600.000.000	Pokja Pengujian Alat Kesehatan	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi *****					5.000.000.000		4.500.000.000		4.000.000.000		3.600.000.000		3.600.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
		Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center		Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara *****	Unit	N/A	27	5.000.000.000	40	4.500.000.000	35	4.000.000.000	30	3.600.000.000	30	3.600.000.000	Pokja Pengujian Alat Kesehatan	KOTA SEMARANG
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ***					876.300.000		940.000.000		995.500.000		1.051.000.000		1.106.500.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi ***	%	2,84	2,85	876.300.000	2,85	940.000.000	2,86	995.500.000	2,86	1.051.000.000	2,87	1.106.500.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
			Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi ****					305.225.000		330.000.000		355.500.000		381.000.000		406.500.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Mamusia Kesehatan sesuai dengan standart ****	%	65,04	66,17	300.975.000	67,31	325.000.000	68,44	350.000.000	69,58	375.000.000	70,72	400.000.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					300.975.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) *****	Orang	N/A	10	300.975.000	10	325.000.000	10	350.000.000	10	375.000.000	10	400.000.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan -, JAWA TENGAH
		Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai dengan standar ****	%	65,67	67,16	4.250.000	68,66	5.000.000	70,15	5.500.000	71,64	6.000.000	73,13	6.500.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					4.250.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi *****	Orang	N/A	10	4.250.000	10	5.000.000	10	5.500.000	10	6.000.000	10	6.500.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan -, JAWA TENGAH
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					571.075.000		610.000.000		640.000.000		670.000.000		700.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Terlaksananya Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten ****	%	90	90	571.075.000	90	610.000.000	95	640.000.000	95	670.000.000	100	700.000.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					571.075.000		610.000.000		640.000.000		670.000.000		700.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan *****	Dokumen	5	4	571.075.000	4	610.000.000	4	640.000.000	4	670.000.000	4	700.000.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan -, JAWA TENGAH
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ***					2.700.000.000		3.225.000.000		3.250.000.000		3.775.000.000		4.300.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan pelatihan sesuai Program Prioritas Nasional di Bapelkes Provinsi		Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang teregestrasi dan berkualitas ***	%	98	99	2.700.000.000	99	3.225.000.000	99	3.250.000.000	99	3.775.000.000	99	4.300.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					2.700.000.000		3.225.000.000		3.250.000.000		3.775.000.000		4.300.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam rangka Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Bapelkes		Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai program prioritas nasional yang diselenggarakan Bapelkes ****	%	N/A	80	2.500.000.000	85	3.000.000.000	90	3.000.000.000	95	3.500.000.000	98	4.000.000.000	Pokja Penyelenggaraan pelatihan	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					2.500.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat *****	Orang	6841	660	2.500.000.000	690	3.000.000.000	690	3.000.000.000	720	3.500.000.000	750	4.000.000.000	Pokja Penyelenggaraan pelatihan	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A KEBUMEN SEMARANG WONOSOBO
		Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam rangka Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Bapelkes		Persentase pengawasan ketercapaian standar mutu pelatihan ****	%	N/A	80	200.000.000	84	225.000.000	85	250.000.000	90	275.000.000	95	300.000.000	Pokja Pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan	
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya pengawasan ketercapaian standar mutu pelatihan di Bapelkes		Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan mutu pelatihan SDM Kesehatan dI Bapelkes *****	Dokumen	N/A	100	200.000.000	125	225.000.000	130	250.000.000	140	275.000.000	150	300.000.000	Pokja Pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A KEBUMEN SEMARANG WONOSOBO
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN ***					170.000.000		180.000.000		200.000.000		220.000.000		240.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam rangka peningkatan standarisasi pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman ***	%	N/A	91	170.000.000	92	180.000.000	93	200.000.000	94	220.000.000	95	240.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
			Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) ****					170.000.000		180.000.000		200.000.000		220.000.000		240.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Terwujudnya penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		Persentase penerbitan pengakuan PBF Cabang & Cabang PAK ****	%	80	87	170.000.000	89	180.000.000	90	200.000.000	92	220.000.000	94	240.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK *****					170.000.000		180.000.000		200.000.000		220.000.000		240.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan *****	Sarana	33	35	170.000.000	35	180.000.000	36	200.000.000	36	220.000.000	36	240.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Terkendalinya penyakit akibat kejadian luar biasa (KLB) dan bencana **							2.030.740.000		2.391.314.000		2.698.345.000		3.002.379.000		3.276.467.000	Dinas Kesehatan	
				Persentase Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian KLB, Bencana, dan Kesehatan Lingkungan **	%	N/A	77	2.030.740.000	82	2.391.314.000	88	2.698.345.000	94	3.002.379.000	100	3.276.467.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					45.740.000		50.314.000		55.345.000		60.879.000		66.967.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa ***	%	100	100	45.740.000	100	50.314.000	100	55.345.000	100	60.879.000	100	66.967.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					45.740.000		50.314.000		55.345.000		60.879.000		66.967.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa ****	%	100	100	45.740.000	100	50.314.000	100	55.345.000	100	60.879.000	100	66.967.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) *****					45.740.000		50.314.000		55.345.000		60.879.000		66.967.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar *****	Orang	8000	500	45.740.000	500	50.314.000	500	55.345.000	500	60.879.000	500	66.967.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa BANJARNEGARA BATANG KENDAL KOTA SALATIGA SEMARANG TEMANGGUNG WONOSOBO
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					50.000.000		62.000.000		67.000.000		72.000.000		75.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang		Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang ***	%	100	100	50.000.000	100	62.000.000	100	67.000.000	100	72.000.000	100	75.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					50.000.000		62.000.000		67.000.000		72.000.000		75.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa dan Bencana ****	%	100	100	50.000.000	100	62.000.000	100	67.000.000	100	72.000.000	100	75.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) *****					50.000.000		62.000.000		67.000.000		72.000.000		75.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar *****	Orang	8000	750	50.000.000	1000	62.000.000	1250	67.000.000	1500	72.000.000	2000	75.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang BANYUMAS CILACAP KEBUMEN KOTA MAGELANG MAGELANG PURBALINGGA PURWOREJO
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					50.000.000		62.000.000		67.000.000		72.000.000		75.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten		Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten ***	%	100	100	50.000.000	100	62.000.000	100	67.000.000	100	72.000.000	100	75.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					50.000.000		62.000.000		67.000.000		72.000.000		75.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten		Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana ****	%	100	100	50.000.000	100	62.000.000	100	67.000.000	100	72.000.000	100	75.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) *****					50.000.000		62.000.000		67.000.000		72.000.000		75.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar *****	Orang	100	1500	50.000.000	2000	62.000.000	2500	67.000.000	3000	72.000.000	3000	75.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten BOYOLALI KARANGANYAR KLATEN SRAGEN SUKOHARJO WONOGIRI
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					50.000.000		62.000.000		69.000.000		72.500.000		74.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati		Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan kejadian luar biasa/wabah serta penanganan bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati ***	%	100	100	50.000.000	100	62.000.000	100	69.000.000	100	72.500.000	100	74.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					50.000.000		62.000.000		69.000.000		72.500.000		74.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati ****	%	100	100	50.000.000	100	62.000.000	100	69.000.000	100	72.500.000	100	74.500.000	SEKSI PELAYANAN	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) *****					50.000.000		62.000.000		69.000.000		72.500.000		74.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar *****	Orang	100	1500	50.000.000	2000	62.000.000	2500	69.000.000	3000	72.500.000	3000	74.500.000	SEKSI PELAYANAN	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati BLORA DEMAK GROBOGAN JEPARA KUDUS PATI REMBANG
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					1.835.000.000		2.155.000.000		2.440.000.000		2.725.000.000		2.985.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok ***	%	100	100	350.000.000	100	400.000.000	100	475.000.000	100	525.000.000	100	600.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					350.000.000		400.000.000		475.000.000		525.000.000		600.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap ****	%	90,01	97	200.000.000	98	200.000.000	99	225.000.000	99	225.000.000	99	250.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan *****					1.200.000.000		1.200.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap *****	Dokumen	N/A	4	200.000.000	4	200.000.000	4	225.000.000	4	225.000.000	4	250.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen Mencapai Target ****	%	91	82	150.000.000	86	200.000.000	89	250.000.000	92	300.000.000	95	350.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan *****					900.000.000		1.200.000.000		1.500.000.000		1.800.000.000		2.100.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen Mencapai Target *****	Dokumen	4	4	150.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/ wabah dan bencana ***	%	48	50	550.000.000	60	625.000.000	65	675.000.000	70	725.000.000	75	750.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					550.000.000		625.000.000		675.000.000		725.000.000		750.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB, dan krisis kesehatan akibat bencana ****	%	71	78	550.000.000	86	625.000.000	94	675.000.000	100	725.000.000	100	750.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) *****					350.000.000		375.000.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar *****	Orang	3043	2800	350.000.000	2600	375.000.000	2400	400.000.000	2200	425.000.000	2000	450.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	35 Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah, JAWA TENGAH
			Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan *****					200.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan *****	Dokumen	4	4	200.000.000	4	250.000.000	4	275.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Penanggulangan Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Persentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan ***	%	N/A	8,57	310.000.000	11,42	380.000.000	14,28	440.000.000	17,14	500.000.000	20	560.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					310.000.000		380.000.000		440.000.000		500.000.000		560.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kab/kota sehat ****	%	42,85	45,71	30.000.000	48,57	35.000.000	48,57	40.000.000	51,42	45.000.000	51,42	50.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan *****					240.000.000		280.000.000		320.000.000		360.000.000		400.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan pelayan an kesehatan lingkungan *****	Dokumen	N/A	4	30.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG Bidang Penanggulangan Penyakit BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN<b
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kab/kota yang telah menyelenggaraka n pengawasan kualitas udara ****	%	N/A	5,71	40.000.000	8,57	50.000.000	11,42	60.000.000	14,28	70.000.000	17,14	80.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan *****					320.000.000		400.000.000		480.000.000		560.000.000		640.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dalam penyelenggaraan pengawasan kualitas udara *****	Dokumen	N/A	4	40.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG Bidang Penanggulangan Penyakit BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN<b
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kab/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat ****	%	N/A	5,71	50.000.000	8,57	60.000.000	11,42	70.000.000	17,14	80.000.000	20	90.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan *****					400.000.000		480.000.000		560.000.000		640.000.000		720.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dalam pemantauan kualitas air minum memenuhi syarat *****	Dokumen	N/A	4	50.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG Bidang Penanggulangan Penyakit BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN<b
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase kab kota dengan tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat ****	%	N/A	57,1	50.000.000	71,42	60.000.000	85,71	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan *****					400.000.000		480.000.000		560.000.000		640.000.000		720.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan dalam pemantauan tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat *****	Dokumen	N/A	4	50.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG Bidang Penanggulangan Penyakit BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN<b
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase kab kota dengan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat ****	%	N/A	20	40.000.000	22,8	60.000.000	25,71	70.000.000	28,57	80.000.000	31,42	90.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan *****					320.000.000		480.000.000		560.000.000		640.000.000		720.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan yaitu pengawasan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat *****	Dokumen	N/A	4	40.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG Bidang Penanggulangan Penyakit BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN<b
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Adaptasi perubahan Iklim Bidang Kesehatan ****	%	N/A	25	25.000.000	28,57	30.000.000	34,28	35.000.000	40	40.000.000	42,85	45.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan *****					200.000.000		240.000.000		280.000.000		320.000.000		360.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan *****	Dokumen	N/A	4	25.000.000	4	30.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG Bidang Penanggulangan Penyakit BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN<b
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ****	%	14,28	20	40.000.000	22,8	45.000.000	25,71	50.000.000	28,57	55.000.000	31,42	60.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan *****					320.000.000		360.000.000		400.000.000		440.000.000		480.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah dokumen fasilitasi penerapan pilar STBM di Kabupaten/Kota *****	Dokumen	N/A	4	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG Bidang Penanggulangan Penyakit BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN<b
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kab/Kota dengan fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan ****	%	N/A	80	35.000.000	88,5	40.000.000	97,1	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan *****					280.000.000		320.000.000		360.000.000		400.000.000		440.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan yaitu fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan *****	Dokumen	N/A	4	35.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	4	55.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG Bidang Penanggulangan Penyakit BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN<b
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan		Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan ***	%	40	50	625.000.000	60	750.000.000	65	850.000.000	70	975.000.000	70	1.075.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					625.000.000		750.000.000		850.000.000		975.000.000		1.075.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Kabupaten/ Kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80% ****	Kabupaten/Kota	27	28	175.000.000	30	200.000.000	32	225.000.000	34	250.000.000	35	250.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan *****					1.050.000.000		1.200.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen respon sinyal SKDR <24 jam minimal 80% *****	Dokumen	4	4	175.000.000	4	200.000.000	4	225.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kabupaten/ Kota yang puskesmasnya melaksanakan surveilans dan intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit ****	%	60	70	75.000.000	75	100.000.000	80	125.000.000	85	150.000.000	85	175.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan *****					450.000.000		600.000.000		750.000.000		900.000.000		1.050.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Surveilans dan Intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit *****	Dokumen	N/A	4	75.000.000	4	100.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Jemaah Haji yang dilakukan kegiatan surveilans kesehatan ****	%	20	42	200.000.000	49	250.000.000	56	300.000.000	63	350.000.000	63	400.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan *****					1.200.000.000		1.500.000.000		1.800.000.000		2.100.000.000		2.400.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah dokumen pelaksanaan surveilans kesehatan haji *****	Dokumen	4	4	200.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	4	400.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
		Tersedianya Layanan pengelolaan penyakit menular dan tidak menular, surveilans dan kesehatan lingkungan		Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I ****	%	100	100	175.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	225.000.000	100	250.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan *****					1.050.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah dokumen pelaksanaan surveilans PD3I *****	Dokumen	4	4	175.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	225.000.000	4	250.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Meningkatnya jaminan pembiayaan kesehatan **							400.300.000.000		400.543.000.000		411.954.000.000		412.305.000.000		462.258.000.000	Dinas Kesehatan	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional **	%	98,83	99,23	400.300.000.000	99,43	400.543.000.000	99,63	411.954.000.000	99,83	412.305.000.000	99,9	462.258.000.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					400.300.000.000		400.543.000.000		411.954.000.000		412.305.000.000		462.258.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota		Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif ***	%	60	74,28	400.300.000.000	82,85	400.543.000.000	91,42	411.954.000.000	100	412.305.000.000	100	462.258.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					400.300.000.000		400.543.000.000		411.954.000.000		412.305.000.000		462.258.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
		Tersedianya Layanan untuk pemenuhan fasilitas kesehatan rujukan sesuai ketentuan dan kepesertaan aktif jaminan kesehatan masyarakat		Persentase kabupaten /kota dengan kenaikan cakupan kepesertaan aktif ****	%	75,4	77,4	400.300.000.000	79,4	400.543.000.000	81,4	411.954.000.000	83,4	412.305.000.000	84	462.258.000.000	Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat *****					400.300.000.000		400.543.000.000		411.954.000.000		412.305.000.000		462.258.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat *****	Dokumen	12	12	400.300.000.000	12	400.543.000.000	12	411.954.000.000	12	412.305.000.000	12	462.258.000.000	Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	KOTA SEMARANG
Meningkatkan status gizi *								1.306.093.000		1.458.953.000		1.585.000.000		1.710.000.000		1.793.000.000	Dinas Kesehatan	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita *	%	17,1	17		16		15		13,6		13		Dinas Kesehatan	
	Menurunnya kasus stunting **							1.306.093.000		1.458.953.000		1.585.000.000		1.710.000.000		1.793.000.000	Dinas Kesehatan	
				Persentase Penurunan Kasus Stunting **	%	0,22	0,15	1.306.093.000	0,2	1.458.953.000	0,25	1.585.000.000	0,3	1.710.000.000	0,35	1.793.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					145.740.000		155.000.000		165.000.000		170.000.000		175.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran ***	%	N/A	28,57	145.740.000	42,85	155.000.000	57,14	165.000.000	71,4	170.000.000	85,86	175.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					145.740.000		155.000.000		165.000.000		170.000.000		175.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		Prosentase Kabupaten/Kota dengan cakupan Datang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa ****	%	N/A	28,57	145.740.000	42,85	155.000.000	57,14	165.000.000	71,4	170.000.000	85,68	175.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat *****					145.740.000		155.000.000		165.000.000		170.000.000		175.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat *****	Dokumen	4	4	145.740.000	4	155.000.000	4	165.000.000	4	170.000.000	4	175.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa BANJARNEGARA BATANG KENDAL KOTA SALATIGA SEMARANG TEMANGGUNG WONOSOBO
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					147.800.000		159.000.000		166.000.000		175.000.000		182.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang		Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran ***	%	N/A	28,57	147.800.000	28,57	159.000.000	42,85	166.000.000	57,14	175.000.000	71,42	182.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					147.800.000		159.000.000		166.000.000		175.000.000		182.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang		Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang ****	%	N/A	28,57	147.800.000	28,57	159.000.000	42,85	166.000.000	57,14	175.000.000	71,42	182.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat *****					147.800.000		159.000.000		166.000.000		175.000.000		182.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat *****	Dokumen	N/A	4	147.800.000	4	159.000.000	4	166.000.000	4	175.000.000	4	182.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang BANYUMAS CILACAP KEBUMEN KOTA MAGELANG MAGELANG PURBALINGGA PURWOREJO
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					149.700.000		159.000.000		169.000.000		175.000.000		186.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten		Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran ***	%	N/A	71,42	149.700.000	71,42	159.000.000	85,71	169.000.000	85,71	175.000.000	85,71	186.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					149.700.000		159.000.000		169.000.000		175.000.000		186.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten		Persentase kabupaten/kota dengan cakupan Ditimbang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten ****	%	N/A	57,14	149.700.000	57,14	159.000.000	71,42	169.000.000	85,71	175.000.000	85,71	186.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat *****					149.700.000		159.000.000		169.000.000		175.000.000		186.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat *****	Dokumen	N/A	4	149.700.000	4	159.000.000	4	169.000.000	4	175.000.000	4	186.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten BOYOLALI KARANGANYAR KLATEN KOTA SURAKARTA SRAGEN SUKOHARJO WONOGIRI
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					130.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati		Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati dengan posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran ***	%	N/A	28,57	130.000.000	42,85	140.000.000	57,14	150.000.000	71,42	160.000.000	85,71	170.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					130.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Tersedianya layanan kesehatan untuk Kejadian Luar Biasa /Bencana, kesehatan ibu anak, pelayanan penyakit menular dan tidak menular dan pengelolaan gizi masyarakat di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati		Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati ****	%	N/A	42,85	130.000.000	45,85	140.000.000	50,85	150.000.000	65,5	160.000.000	68,7	170.000.000	SEKSI PELAYANAN	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat *****					130.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat *****	Dokumen	N/A	2	130.000.000	3	140.000.000	3	150.000.000	4	160.000.000	4	170.000.000	SEKSI PELAYANAN	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati BLORA DEMAK GROBOGAN JEPARA KUDUS PATI REMBANG
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					732.853.000		845.953.000		935.000.000		1.030.000.000		1.080.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup		Prevalensi wasting balita ***	%	N/A	6,7	732.853.000	6,5	845.953.000	6,3	935.000.000	6,1	1.030.000.000	6	1.080.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					732.853.000		845.953.000		935.000.000		1.030.000.000		1.080.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Persentase kabupaten kota dengan minimal 80% Baduta mendapatkan MPASI sesuai standar ****	%	91	92	632.853.000	94	695.953.000	95	725.000.000	96	755.000.000	97	800.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat *****					1.265.706.000		1.391.906.000		1.450.000.000		1.510.000.000		1.600.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat *****	Dokumen	N/A	4	632.853.000	4	695.953.000	4	725.000.000	4	755.000.000	4	800.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGG
		Terlaksananya pelayanan kesehatan siklus hidup di Kabupaten/Kota sesuai standar		Persentase Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya ****	%	N/A	55	100.000.000	60	150.000.000	65	210.000.000	70	275.000.000	75	280.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat *****					200.000.000		300.000.000		420.000.000		550.000.000		560.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Pemantauan Balita Tumbuh Kembang) *****	Dokumen	N/A	4	100.000.000	4	150.000.000	4	210.000.000	4	275.000.000	4	280.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	BANJARNEGARA BANYUMAS BATANG BLORA BOYOLALI BREBES CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KARANGANYAR KEBUMEN KENDAL KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PEMALANG PURBALINGG
RSUD Dr. MOEWARDI																		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *								1.264.090.393.000		1.265.173.413.000		1.277.855.547.000		1.292.164.502.000		1.421.684.952.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan *	Angka	79,81	84,5		85		85,5		86		86,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSUD Dr. Moewardi **							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Manajemen Risiko RSUD Dr. Moewardi **	Angka	2,9	3	3.000.000	3	3.000.000	3,05	3.000.000	3,05	3.000.000	3,1	3.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di RSUD Dr.Moewardi		Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD Dr. Moewardi ***	%	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	RSUD Dr. Moewardi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi RSUD Dr.Moeward		persentase dokumen perencanaan & evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan yang berlaku ****	%	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	1	9	1.000.000	9	1.000.000	9	1.000.000	9	1.000.000	9	1.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	2	4	1.000.000	6	1.000.000	8	1.000.000	10	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	45	1.000.000	45	1.000.000	45	1.000.000	45	1.000.000	45	1.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSUD Dr. Moewardi **							1.264.087.393.000		1.265.170.413.000		1.277.852.547.000		1.292.161.502.000		1.421.681.952.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Dr. Moewardi **	Angka	90	91,02	1.264.087.393.000	91,03	1.265.170.413.000	91,04	1.277.852.547.000	91,05	1.292.161.502.000	91,06	1.421.681.952.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					1.264.087.393.000		1.265.170.413.000		1.277.852.547.000		1.292.161.502.000		1.421.681.952.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD Dr.Moewardi		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi ***	%	100	100	201.221.027.000	100	211.396.506.000	100	219.226.642.000	100	231.804.207.950	100	242.008.877.000	RSUD Dr. Moewardi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					201.216.027.000		211.391.506.000		219.221.642.000		231.799.207.950		242.003.877.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan RSUD Dr.Moewardi		persentase ketercapaian tata kelola anggaran,perbendaharaan,dan akuntansi ****	%	100	100	201.216.027.000	100	211.391.506.000	100	219.221.642.000	100	231.799.207.950	100	242.003.877.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					201.214.027.000		211.389.506.000		219.219.642.000		231.797.207.950		242.001.877.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	1333	1415	201.214.027.000	1420	211.389.506.000	1425	219.219.642.000	1430	231.797.207.950	1435	242.001.877.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD *****					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD *****	Dokumen	N/A	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN AKUNTANSI	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****	Dokumen	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN ORGANISASI	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian *****					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	RSUD Dr. Moewardi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEGAWAI	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	N/A	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN MUTASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum RSUD Dr.Moewardi		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA, HUKUM DAN KERJASAMA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD Dr.MOEWARDI		Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Dr. Moewardi ***	%	82	82,2	1.062.866.366.000	82,4	1.053.773.907.000	82,6	1.058.625.905.000	82,8	1.060.357.294.050	83	1.179.673.075.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Peningkatan Pelayanan BLUD ****					1.062.866.366.000		1.053.773.907.000		1.058.625.905.000		1.060.357.294.050		1.179.673.075.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Meningkatnya pelayanan BLUD di RSUD Dr.MOEWARDI		Cost Recovery Rate (CRR) Parsial RSUD Dr. MOEWARDI ****	%	100	100	1.062.864.366.000	100	1.053.771.907.000	100	1.058.623.905.000	100	1.060.355.294.050	100	1.179.671.075.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD *****					2.125.728.732.000		2.107.543.814.000		2.117.247.810.000		2.120.710.588.100		2.359.342.150.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan *****	Unit Kerja	1	10	1.062.864.366.000	10	1.053.771.907.000	10	1.058.623.905.000	10	1.060.355.294.050	10	1.179.671.075.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Meningkatnya pengelolaan pendapatan BLUD di RSUD Dr.Moewardi		Persentase peningkatan pendapatan RS ****	%	N/A	3,5	2.000.000	3,5	2.000.000	3,5	2.000.000	3,5	2.000.000	3,5	2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD *****					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Pengembangan Pendapatan)		Jumlah Dokumen Pengembangan Pendapatan BLUD di RS Moewardi *****	Dokumen	N/A	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Penatausahaan Pendapatan)		Jumlah Dokumen Penatausahaan Pendapatan BLUD di RS Moewardi *****	Dokumen	N/A	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas kesehatan *								3.040.000.000		3.040.000.000		3.040.000.000		3.040.000.000		3.040.000.000	Dinas Kesehatan	
				Usia Harapan Hidup (UHH) *	Tahun	74,93	75,46		75,68		75,9		76,12		76,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD Dr. Moewardi **							3.040.000.000		3.040.000.000		3.040.000.000		3.040.000.000		3.040.000.000	Dinas Kesehatan	
				Net Death Rate (NDR) RSUD Dr. Moewardi **	Permil	46,17	55,8	3.040.000.000	55,6	3.040.000.000	55,5	3.040.000.000	55,3	3.040.000.000	55,1	3.040.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					3.020.000.000		3.020.000.000		3.020.000.000		3.020.000.000		3.020.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI		Persentase indikator mutu pelayanan medis yang memenuhi target di RSUD Dr. Moewardi ***	%	N/A	25	2.000.000	37	2.000.000	50	2.000.000	87	2.000.000	100	2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya proses pelayanan medis yang berkualitas		persentase unit kerja pelayanan medis yang capaian indikator mutunya sesuai target ****	%	N/A	30	2.000.000	50	2.000.000	55	2.000.000	75	2.000.000	100	2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	RSUD Dr. Moewardi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan *****	Unit	11	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	POKJA PELAYANAN RAWAT INAP	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		Jumlah Fasilitas Kesehatan Pelayanan Medis Rawat Jalan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan *****	Unit	N/A	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	POKJA PELAYANAN RAWAT JALAN	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI		Persentase indikator mutu pelayanan keperawatan yang memenuhi target di RSUD Dr. Moewardi ***	%	N/A	28	2.000.000	42	2.000.000	57	2.000.000	85	2.000.000	100	2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya proses pelayanan keperawatan yang berkualitas		persentase unit kerja pelayanan keperawatan yang capaian indikator mutunya sesuai target ****	%	N/A	30	2.000.000	50	2.000.000	55	2.000.000	75	2.000.000	100	2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Mutu		Jumlah Fasilitas Kesehatan Mutu Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan *****	Unit	N/A	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT JALAN	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Mutu		Jumlah Fasilitas Kesehatan Mutu Pelayanan Keperawatan Rawat Inap yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan *****	Unit	N/A	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT INAP	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI		Persentase penyediaan fasilitas, sarana dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD Dr. Moewardi ***	%	100	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan RSUD Dr.Moewardi		Persentase alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD dr.Moewardi ****	%	60	90	1.000.000.000	90	1.000.000.000	90	1.000.000.000	90	1.000.000.000	90	1.000.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan *****	Unit	13	50	1.000.000.000	60	1.000.000.000	60	1.000.000.000	65	1.000.000.000	70	1.000.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
		Tersedianya fasilitas pelayanan dan sarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD Dr.Moewardi		Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan sarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD dr.moewardi Surakarta ****	%	65	60	1.000.000.000	70	1.000.000.000	80	1.000.000.000	90	1.000.000.000	100	1.000.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Pengembangan Rumah Sakit *****					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	RSUD Dr. Moewardi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit *****	Unit	10	12	1.000.000.000	13	1.000.000.000	14	1.000.000.000	15	1.000.000.000	16	1.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI		Persentase Penyediaan Prasarana, Obat dan BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD Dr. Moewardi ***	%	N/A	90	1.010.000.000	90	1.010.000.000	90	1.010.000.000	90	1.010.000.000	90	1.010.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					1.010.000.000		1.010.000.000		1.010.000.000		1.010.000.000		1.010.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya Prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD dr.Moewardi		Persentase penyediaan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD dr.Moewardi ****	%	60	60	1.000.000.000	70	1.000.000.000	80	1.000.000.000	90	1.000.000.000	100	1.000.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Pengembangan Rumah Sakit *****					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	RSUD Dr. Moewardi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan prasarana agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit Dr.Moewardi		Jumlah Prasarana Jaringan Pelayanan RS yang disediakan untuk pelayanan *****	Paket	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	Seksi Penunjang Sarana Prasarana Non Medis	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
		Tersedianya Obat BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan RSUD Dr.Moewardi		Persentase penyediaan obat dan BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD dr.Moewardi ****	%	90	90	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	2	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	Seksi Penunjang Terapi	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI		Persentase indikator mutu pelayanan penunjang medis dan penunjang prasarana sarana yang sesuai standar di RSUD Dr. Moewardi ***	%	N/A	33	4.000.000	50	4.000.000	67	4.000.000	83	4.000.000	100	4.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	RSUD Dr. Moewardi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya proses pelayanan penunjang sarpras medis dan non medis yang berkualitas		persentase indikator mutu pelayanan penunjang sarpras medis dan non medis yang sesuai dengan standar RS ****	%	N/A	33	2.000.000	60	2.000.000	65	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Mutu		Jumlah unit pelayanan penunjang sarpras medis yang ditingkatkan mutunya sesuai standar *****	%	N/A	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	Seksi Penunjang Sarana Prasarana Medis	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Mutu		Jumlah unit pelayanan penunjang sarpras non medis yang ditingkatkan mutunya sesuai standar *****	%	N/A	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	Seksi Penunjang Sarana Prasarana Non Medis	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
		Tersedianya pelayanan penunjang medis diagnostik dan terapi yang berkualitas		Persentase indikator mutu pelayanan penunjang medis diagnostik dan terapi yang sesuai standar ****	%	N/A	33	2.000.000	50	2.000.000	67	2.000.000	83	2.000.000	100	2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Mutu		Jumlah unit pelayanan penunjang medis diagnostik yang ditingkatkan mutunya sesuai standar *****	%	N/A	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	Seksi Penunjang Diagnosa	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Mutu		Jumlah unit pelayanan penunjang medis terapi yang ditingkatkan mutunya sesuai standar *****	%	N/A	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	Seksi Penunjang Terapi	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI		Persentase capaian kinerja pelayanan pendidikan dan penelitian yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit di RSUD Dr. Moewardi ***	%	N/A	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Tersedianya proses tata kelola pendidikan klinis dan penelitian yang berkualitas		Persentase pelaksanaan pendidikan dan penelitian yang terintegrasi dengan pelayanan di Rumah Sakit sesuai target ****	%	N/A	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit *****					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar *****	Unit	N/A	5	1.000.000	8	1.000.000	8	1.000.000	9	1.000.000	10	1.000.000	SUB BAG PENELITIAN	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
		Meningkatnya kualitas proses pendidikan klinis		Jumlah institusi pendidikan klinis yang memiliki MOU dengan RS *****	Unit	N/A	3	1.000.000	3	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	5	1.000.000	SUB BAG PENDIDIKAN	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ***					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan di RSUD Dr.MOEWARDI		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD Dr. Moewardi ***	%	30	34	10.000.000	51	10.000.000	68	10.000.000	85	10.000.000	100	10.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Dr. Moewardi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK		Jumlah Jenis pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi ****	Kegiatan	2	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat *****	Orang	995	400	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	SUB BAGIAN PELATIHAN	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ***					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSUD Dr.MOEWARDI		Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD Dr. Moewardi ***	%	90	3	10.000.000	3,5	10.000.000	4	10.000.000	4,5	10.000.000	5	10.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
		Terlaksananya Advokasi pemberdayaan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi		Jumlah penerima kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS Moewardi ****	Orang	4170	4405	10.000.000	4559	10.000.000	4829	10.000.000	5011	10.000.000	5261	10.000.000	RSUD Dr. Moewardi	
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Dr. Moewardi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****	Dokumen	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	SUB BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN	KOTA SURAKARTA RSUD Dr. Moewardi
RSUD Prof. Dr. MARGONO																		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *								722.011.847.000		740.618.798.000		748.026.435.000		755.508.150.000		831.073.465.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan *	Angka	79,81	84,5		85		85,5		86		86,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo **							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Manajemen Risiko RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo **	Angka	3,12	3,13	30.000.000	3,135	30.000.000	3,14	30.000.000	3,145	30.000.000	3,15	30.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo		Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ***	%	N/A	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	N/A	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SUBBAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, KELURAHAN BERKOH, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	6	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI	KELURAHAN BERKOH, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS OPD Provinsi
		Tersedianya data dan informasi yang berkualitas		jumlah unit kerja yang telah terintegrasi dalam pengelolaan IT *****	Unit	N/A	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	SUBBAGIAN REKAM MEDIK	OPD Provinsi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, KELURAHAN BERKOH, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo **							721.981.847.000		740.588.798.000		747.996.435.000		755.478.150.000		831.043.465.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo **	Angka	86	86,75	721.981.847.000	87	740.588.798.000	87,25	747.996.435.000	87,5	755.478.150.000	87,75	831.043.465.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					721.981.847.000		740.588.798.000		747.996.435.000		755.478.150.000		831.043.465.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo		Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ***	%	N/A	91	624.999.996.000	92	675.000.000.000	93	710.000.000.000	94	717.481.715.000	95	793.047.030.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Peningkatan Pelayanan BLUD ****					624.999.996.000		675.000.000.000		710.000.000.000		717.481.715.000		793.047.030.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Meningkatnya pelayanan BLUD untuk menunjang operasional RS		Realisasi CRR Parsial RSUD Prof Dr Margono Soekarjo ****	%	N/A	101	624.999.996.000	102	675.000.000.000	103	710.000.000.000	104	717.481.715.000	105	793.047.030.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD *****					624.999.996.000		675.000.000.000		710.000.000.000		717.481.715.000		793.047.030.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan *****	Unit Kerja	9	9	624.999.996.000	9	675.000.000.000	9	710.000.000.000	9	717.481.715.000	9	793.047.030.000	SUBBAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ***	%	N/A	100	96.981.851.000	100	65.588.798.000	100	37.996.435.000	100	37.996.435.000	100	37.996.435.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					96.950.851.000		65.558.798.000		37.966.435.000		37.966.435.000		37.966.435.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah		jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	%	N/A	100	96.950.851.000	100	65.558.798.000	100	37.966.435.000	100	37.966.435.000	100	37.966.435.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					96.930.851.000		65.538.798.000		37.946.435.000		37.946.435.000		37.946.435.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	887	886	96.930.851.000	885	65.538.798.000	885	37.946.435.000	884	37.946.435.000	884	37.946.435.000	SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, KELURAHAN BERKOH, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SUBBAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, KELURAHAN BERKOH, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****	Dokumen	12	13	10.000.000	13	10.000.000	13	10.000.000	13	10.000.000	13	10.000.000	SUBBAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, KELURAHAN BERKOH, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****					21.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentasi layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	N/A	100	21.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****					11.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	886	11.000.000	885	10.000.000	885	10.000.000	884	10.000.000	884	10.000.000	SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	N/A	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUBBAGIAN TATA USAHA HUKUM DAN HUMAS	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas kesehatan *								9.655.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000	Dinas Kesehatan	
				Usia Harapan Hidup (UHH) *	Tahun	74,93	75,46		75,68		75,9		76,12		76,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo **							9.655.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000	Dinas Kesehatan	
				Net Death Rate (NDR) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo **	Permil	30,14	30,13	9.655.000.000	30,125	145.000.000	30,12	145.000.000	30,12	145.000.000	30,11	145.000.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					9.155.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo		Persentase pemenuhan fasilitas prasarana, sarana, alat kesehatan, obat-BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan RS di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ***	%	N/A	75	9.155.000.000	80	105.000.000	85	105.000.000	90	105.000.000	95	105.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					9.100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Tersedianya fasilitas pelayanan Sarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase peyediaan Sarana di RSUD Margono Soekarjo ****	%	60	100	100.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Pengembangan Rumah Sakit *****					200.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit *****	Unit	N/A	1	100.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi Jateng, KELURAHAN BERKOH, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya fasilitas pelayanan alat kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan alat kesehatan utuk mendukung pelayana unggula dan pelayanan RS di RSUD Margono Soekarjo ****	%	100	100	5.000.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					5.000.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan *****	Unit	16	10	5.000.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	POKJA PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Prov Jateng, KELURAHAN BERKOH, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
		Tersedianya fasilitas pelayanan obat dan BHP-BMHP untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat, BHP-BMHP RSUD Margono Soekarjo ****	%	70	100	3.900.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					3.900.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	N/A	1	2.500.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI PENUNJANG TERAPI	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, makanan dan minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Laboratorium, Radiologi dan Bank Darah) *****	Paket	N/A	1	1.400.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI PENUNJANG DIAGNOSA	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya fasilitas pelayanan Prasarana untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayana Prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan pelayaan rumah sakit laiya di RSUD Margoo Soekarjo ****	%	60	60	100.000.000	65	10.000.000	70	10.000.000	75	10.000.000	80	10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Pengembangan Rumah Sakit *****					200.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Jaringan RS/Ambulance)) *****	Unit	N/A	1	100.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA NON MEDIS	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi ****					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah ketersediaan Telemedicine di RSUD prof DR.Margono Soekarjo ****	Paket	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan *****					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan *****	Dokumen	N/A	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT JALAN	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, KELURAHAN BERKOH, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Tersedianya proses pelayanan rumah sakit yang berkualitas		Persentase unit kerja pelayanan medis yang capaian indikator capaian mutunya sesuai target ****	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan *****	Unit	N/A	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	SEKSI PENJAMINAN MUTU PELAYANAN	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, KELURAHAN BERKOH, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS
		Tersedianya proses pelayanan rumah sakit yang berkualitas		Jumlah Instansi yang memiliki MOU dengan RSUD Margono Soekarjo ****	Instansi	50	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit *****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar		Jumlah instansi memiliki MOU dengan RS *****	Unit	5	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	SEKSI KERJASAMA	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
		Tersedianya proses pelayanan rumah sakit yang berkualitas		Persentase Penelitian yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo ****	%	N/A	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit *****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar		Jumlah penelitian yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Margono Soekarjo *****	Unit	1	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
		Tersedianya proses pelayanan rumah sakit yang berkualitas		Persentase unit kerja pelayanan keperawatan yang capaian idikator mutunya sesuai target ****	%	N/A	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		Jumlah Fasilitas Kesehatan Mutu Pelayanan Keperawatan yang dilakuka pengukuran Idikator Nasional Mutu (INM) Pelayana Kesehatan *****	Unit	N/A	28	10.000.000	28	10.000.000	28	10.000.000	28	10.000.000	28	10.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT INAP	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
		Tersedianya proses pelayanan rumah sakit yang berkualitas		Persentase unit kerja pelayanan penunjang sarpras medis yang capaian indikator mutunya mencapai target ****	%	N/A	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		Jumlah unit kerja pelayanan penunjang sarpras medis yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) *****	Unit	N/A	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA MEDIS	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ***					450.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ***	%	N/A	65	450.000.000	70	30.000.000	75	30.000.000	80	30.000.000	85	30.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					450.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Terlaksananya Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK		Jumlah jenis pelatihan internal dan eksternal yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi ****	Kegiatan	N/A	5	250.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					500.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan internal/eksternal meningkat *****	Orang	N/A	1750	250.000.000	2000	20.000.000	2250	20.000.000	2500	20.000.000	2750	20.000.000	SEKSI PELATIHAN	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, KELURAHAN BERKOH, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS
		Terlaksananya Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK		Jumlah jenis pendidikan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi ****	Kegiatan	N/A	5	200.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					400.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat *****	Orang	N/A	3	200.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	SEKSI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, KELURAHAN BERKOH, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ***					50.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo		Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD Prof Dr Margono SoekarjoRSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ***	%	40	50	50.000.000	55	10.000.000	60	10.000.000	65	10.000.000	70	10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ****					50.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Advokasi pemberdayaan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi		Jumlah penerima kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RSUD Prof Dr Margono Soekarjo ****	Orang	1200	2000	50.000.000	2400	10.000.000	2800	10.000.000	3200	10.000.000	3600	10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****					50.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****	Dokumen	N/A	12	50.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	POKJA PELAYANAN RAWAT JALAN	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, KELURAHAN BERKOH, PURWOKERTO SELATAN, BANYUMAS
RSUD Dr. ADHYATMA, MPH																		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *								299.016.129.000		297.289.424.000		303.703.354.000		310.720.593.000		317.895.361.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan *	Angka	79,81	84,5		85		85,5		86		86,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSUD dr. ADHYATMA, MPH **							298.916.129.000		297.189.424.000		303.603.354.000		310.620.593.000		317.795.361.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. ADHYATMA, MPH **	Angka	94,08	94,08	298.916.129.000	94,08	297.189.424.000	94,08	303.603.354.000	94,08	310.620.593.000	94,08	317.795.361.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					298.916.129.000		297.189.424.000		303.603.354.000		310.620.593.000		317.795.361.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH		Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. ADHYATMA, MPH ***	%	52,91	49,19	185.033.918.000	50,4	180.030.000.000	56,26	183.975.000.000	52,38	188.011.000.000	51,47	192.130.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Peningkatan Pelayanan BLUD ****					185.033.918.000		180.030.000.000		183.975.000.000		188.011.000.000		192.130.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Meningkatnya pelayanan BLUD		Cost recovery Rate (CRR) Parsial RSUD dr. Adhyatma, MPH ****	%	80,05	95,93	185.033.918.000	100	180.030.000.000	100	183.975.000.000	100	188.011.000.000	100	192.130.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD *****					185.033.918.000		180.030.000.000		183.975.000.000		188.011.000.000		192.130.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan *****	Unit Kerja	6	6	185.033.918.000	6	180.030.000.000	6	183.975.000.000	6	188.011.000.000	6	192.130.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD dr. ADHYATMA, MPH		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH ***	%	100	100	113.882.211.000	100	117.159.424.000	100	119.628.354.000	100	122.609.593.000	100	125.665.361.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					113.782.211.000		116.619.784.000		119.528.354.000		122.509.593.000		125.565.361.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	1	1	113.782.211.000	1	116.619.784.000	1	119.528.354.000	1	122.509.593.000	1	125.565.361.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					113.732.211.000		116.569.784.000		119.478.354.000		122.459.593.000		125.515.361.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	832	837	113.732.211.000	832	116.569.784.000	828	119.478.354.000	833	122.459.593.000	838	125.515.361.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN AKUNTANSI	BANJARNEGARA OPD Provinsi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****					50.000.000		489.640.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	50.000.000	100	489.640.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****					0		439.640.000		0		0		0	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	0	1	439.640.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	RSUD dr. ADHYATMA, MPH
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	4500	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Hubungan Masyarakat	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSUD dr. ADHYATMA, MPH **							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Manajemen Risiko RSUD dr. ADHYATMA, MPH **	Angka	2,903	3,01	100.000.000	3,02	100.000.000	3,03	100.000.000	3,04	100.000.000	3,05	100.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di RSUD dr. ADHYATMA, MPH		Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD dr. ADHYATMA, MPH ***	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	11	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	6	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	SUB BAGIAN MONEV	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas kesehatan *								86.254.724.000		89.212.740.000		86.663.832.000		83.550.265.000		91.780.632.000	Dinas Kesehatan	
				Usia Harapan Hidup (UHH) *	Tahun	74,93	75,46		75,68		75,9		76,12		76,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH **							86.254.724.000		89.212.740.000		86.663.832.000		83.550.265.000		91.780.632.000	Dinas Kesehatan	
				Net Death Rate (NDR) RSUD dr. ADHYATMA, MPH **	Permil	33,34	33,1	86.254.724.000	33	89.212.740.000	32,9	86.663.832.000	32,8	83.550.265.000	32,7	91.780.632.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					85.004.724.000		87.962.740.000		85.413.832.000		82.300.265.000		90.530.632.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH		Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH ***	%	100	100	15.413.440.000	100	17.363.440.000	100	19.363.440.000	100	21.363.440.000	100	23.363.440.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					15.050.000.000		17.000.000.000		19.000.000.000		21.000.000.000		23.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan ****	%	100	100	15.050.000.000	100	17.000.000.000	100	19.000.000.000	100	21.000.000.000	100	23.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Pengembangan Rumah Sakit *****					15.050.000.000		17.000.000.000		19.000.000.000		21.000.000.000		23.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit *****	Unit	2	2	15.050.000.000	2	17.000.000.000	2	19.000.000.000	2	21.000.000.000	2	23.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	KOTA SEMARANG RSUD dr. ADHYATMA, MPH
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					363.440.000		363.440.000		363.440.000		363.440.000		363.440.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan layanan kesehatan ****	%	N/A	100	363.440.000	100	363.440.000	100	363.440.000	100	363.440.000	100	363.440.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit *****					363.440.000		363.440.000		363.440.000		363.440.000		363.440.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit *****	Dokumen	12	12	363.440.000	12	363.440.000	12	363.440.000	12	363.440.000	12	363.440.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	KOTA SEMARANG RSUD dr. ADHYATMA, MPH
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH		Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan, prasarana dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH ***	%	100	100	62.591.284.000	100	63.599.300.000	100	59.050.392.000	100	53.936.825.000	100	60.167.192.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					62.591.284.000		63.599.300.000		59.050.392.000		53.936.825.000		60.167.192.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan alat kesehatan dan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan Rumah Sakit ****	%	100	100	62.091.284.000	100	63.099.300.000	100	58.550.392.000	100	53.436.825.000	100	59.667.192.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					62.041.284.000		63.049.300.000		58.500.392.000		53.386.825.000		59.617.192.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan *****	Unit	99	5	62.041.284.000	5	63.049.300.000	6	58.500.392.000	5	53.386.825.000	5	59.617.192.000	POKJA PELAYANAN RAWAT INAP	KOTA SEMARANG RSUD dr. ADHYATMA, MPH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan *****					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas *****	Unit	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	POKJA PELAYANAN RAWAT JALAN	KOTA SEMARANG RSUD dr. ADHYATMA, MPH
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan ****	%	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar *****	Unit	986	1010	500.000.000	1020	500.000.000	1030	500.000.000	1040	500.000.000	1050	500.000.000	Seksi Penunjang Non Medis	KOTA SEMARANG RSUD dr. ADHYATMA, MPH
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH		Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH ***	%	100	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan ****	%	100	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	1	6	5.000.000.000	6	5.000.000.000	6	5.000.000.000	6	5.000.000.000	6	5.000.000.000	Seksi Penunjang Medis	KOTA SEMARANG RSUD dr. ADHYATMA, MPH
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan Bahan Habis Pakai (BHP) dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ****	%	100	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Tersedianya Bahan Habis pakai dan bahan medis habis pakai di fasilitas kesehatan		Jumlah Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	1	17	2.000.000.000	17	2.000.000.000	17	2.000.000.000	17	2.000.000.000	17	2.000.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT JALAN	KOTA SEMARANG RSUD dr. ADHYATMA, MPH
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ***					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan di RSUD dr. Adhyatma, MPH		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD dr. ADHYATMA, MPH ***	%	34,88	86,95	1.000.000.000	87,12	1.000.000.000	87,32	1.000.000.000	87,51	1.000.000.000	87,75	1.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Terlaksananya Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kompetensi ****	Kegiatan	5	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat *****	Orang	422	1020	1.000.000.000	1022	1.000.000.000	1024	1.000.000.000	1026	1.000.000.000	1029	1.000.000.000	SUB BAGIAN DIKLAT	KOTA SEMARANG RSUD dr. ADHYATMA, MPH
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ***					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masayarakat di RSUD dr. Adhyatma, MPH		Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. ADHYATMA, MPH ***	%	100	5,24	250.000.000	5,43	250.000.000	5,58	250.000.000	5,69	250.000.000	5,77	250.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ****					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Terlaksananya Advokasi pemberdayaan kemitraan, peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor		Jumlah penerima kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RSUD dr. Adhyatma, MPH ****	Orang	1000	1105	250.000.000	1165	250.000.000	1230	250.000.000	1300	250.000.000	1375	250.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****	Dokumen	3	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT INAP	KOTA SEMARANG RSUD dr. ADHYATMA, MPH
RSUD Dr. REHATTA																		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *								111.450.000.000		113.988.140.000		117.937.625.000		122.282.681.000		127.870.000.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan *	Angka	79,81	84,5		85		85,5		86		86,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSUD dr. REHATTA **							111.430.000.000		113.968.140.000		117.917.625.000		122.262.681.000		127.850.000.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. REHATTA **	Angka	85,2	90,01	111.430.000.000	90,02	113.968.140.000	90,03	117.917.625.000	90,04	122.262.681.000	90,05	127.850.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					111.430.000.000		113.968.140.000		117.917.625.000		122.262.681.000		127.850.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA		Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. REHATTA ***	%	35	52	65.500.000.000	53	67.812.340.000	54	71.777.625.000	55	76.017.681.000	56	81.500.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Peningkatan Pelayanan BLUD ****					65.500.000.000		67.812.340.000		71.777.625.000		76.017.681.000		81.500.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Meningkatnya pelayanan BLUD		CRR Parsial RSUD dr. Rehatta ****	%	88	90	65.500.000.000	91	67.812.340.000	92	71.777.625.000	93	76.017.681.000	94	81.500.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD *****					65.500.000.000		67.812.340.000		71.777.625.000		76.017.681.000		81.500.000.000	RSUD dr. REHATTA	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan *****	Unit Kerja	4	4	65.500.000.000	4	67.812.340.000	4	71.777.625.000	4	76.017.681.000	4	81.500.000.000	SUBBAG KEUANGAN	JEPARA OPD Provinsi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD dr. REHATTA		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD dr. REHATTA ***	%	100	100	45.930.000.000	100	46.155.800.000	100	46.140.000.000	100	46.245.000.000	100	46.350.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					45.900.000.000		46.000.000.000		46.100.000.000		46.200.000.000		46.300.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	14	14	45.900.000.000	14	46.000.000.000	14	46.100.000.000	14	46.200.000.000	14	46.300.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					45.900.000.000		46.000.000.000		46.100.000.000		46.200.000.000		46.300.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	283	302	45.900.000.000	302	46.000.000.000	302	46.100.000.000	302	46.200.000.000	302	46.300.000.000	SUBBAG KEUANGAN	JEPARA OPD Provinsi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****					20.000.000		145.800.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	20.000.000	100	145.800.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****					0		120.800.000		0		0		0	RSUD dr. REHATTA	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	0	1	120.800.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUBBAG TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****					20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	SUBBAG TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD dr. REHATTA	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUBBAG TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSUD dr. REHATTA **							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Manajemen Risiko RSUD dr. REHATTA **	Angka	3,08	3,1	20.000.000	3,11	20.000.000	3,12	20.000.000	3,13	20.000.000	3,14	20.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di RSUD dr. REHATTA		Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD dr. REHATTA ***	%	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	11	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	SUBBAG PROGRAM	JEPARA OPD Provinsi
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	11	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	SUBBAG PROGRAM	JEPARA OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan kualitas kesehatan *								17.896.908.000		16.211.231.000		13.563.740.000		10.533.697.000		18.228.016.000	Dinas Kesehatan	
				Usia Harapan Hidup (UHH) *	Tahun	74,93	75,46		75,68		75,9		76,12		76,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD dr. REHATTA **							17.896.908.000		16.211.231.000		13.563.740.000		10.533.697.000		18.228.016.000	Dinas Kesehatan	
				Net Death Rate (NDR) RSUD dr. REHATTA **	Permil	11	10,8	17.896.908.000	10,7	16.211.231.000	10,6	13.563.740.000	10,5	10.533.697.000	10,4	18.228.016.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					17.616.908.000		15.916.231.000		13.253.740.000		10.208.697.000		17.888.016.000	RSUD dr. REHATTA	
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Rehatta		Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA ***	%	100	100	8.366.908.000	100	7.116.231.000	100	5.167.000.000	100	4.171.000.000	100	11.175.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					7.227.908.000		5.963.231.000		4.000.000.000		3.000.000.000		10.000.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan ****	%	100	100	7.227.908.000	100	5.963.231.000	100	4.000.000.000	100	3.000.000.000	100	10.000.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya *****					7.227.908.000		5.963.231.000		4.000.000.000		3.000.000.000		10.000.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar *****	Unit	1	1	7.227.908.000	1	5.963.231.000	1	4.000.000.000	1	3.000.000.000	1	10.000.000.000	SUBBAG TATA USAHA	JEPARA RSUD dr. REHATTA

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					1.139.000.000		1.153.000.000		1.167.000.000		1.171.000.000		1.175.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan layanan kesehatan ****	%	100	100	959.000.000	100	959.000.000	100	959.000.000	100	959.000.000	100	959.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit *****					959.000.000		959.000.000		959.000.000		959.000.000		959.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit *****	Dokumen	12	12	959.000.000	12	959.000.000	12	959.000.000	12	959.000.000	12	959.000.000	SUBBAG KEUANGAN	JEPARA RSUD dr. REHATTA
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase pengelolaan layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular ****	%	100	100	100.000.000	100	104.000.000	100	108.000.000	100	112.000.000	100	116.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					200.000.000		208.000.000		216.000.000		224.000.000		232.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****	Dokumen	12	12	50.000.000	12	52.000.000	12	54.000.000	12	56.000.000	12	58.000.000	POKJA PELAYANAN RAWAT JALAN	JEPARA RSUD dr. REHATTA
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Rawat Inap *****	Dokumen	12	12	50.000.000	12	52.000.000	12	54.000.000	12	56.000.000	12	58.000.000	POKJA PELAYANAN RAWAT INAP	JEPARA RSUD dr. REHATTA
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase pengelolaan layanan kesehatan penyakit menular kusta ****	%	100	100	80.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					160.000.000		180.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	RSUD dr. REHATTA	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kusta di Rawat Jalan *****	Dokumen	12	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT JALAN	JEPARA RS UD dr. REHATTA
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Kusta di Rawat Inap *****	Dokumen	12	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT INAP	JEPARA RS UD dr. REHATTA
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Rehatta		Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA ***	%	100	100	4.250.000.000	100	3.300.000.000	100	3.286.740.000	100	3.037.697.000	100	3.713.016.000	RSUD dr. REHATTA	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					4.250.000.000		3.300.000.000		3.286.740.000		3.037.697.000		3.713.016.000	RSUD dr. REHATTA	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS ****	%	100	100	4.000.000.000	100	3.000.000.000	100	2.936.740.000	100	2.687.697.000	100	3.363.016.000	RSUD dr. REHATTA	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					4.000.000.000		3.000.000.000		2.936.740.000		2.687.697.000		3.363.016.000	RSUD dr. REHATTA	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan *****	Unit	3	6	4.000.000.000	8	3.000.000.000	7	2.936.740.000	5	2.687.697.000	5	3.363.016.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT JALAN	JEPARA RS UD dr. REHATTA

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan ****	%	100	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					250.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar *****	Unit	672	690	250.000.000	698	300.000.000	705	350.000.000	710	350.000.000	712	350.000.000	SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	JEPARA RSUD dr. REHATTA
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Rehatta		Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA ***	%	100	100	5.000.000.000	100	5.500.000.000	100	4.800.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					5.000.000.000		5.500.000.000		4.800.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase capaian ketersediaan obat - obatan dan BHP BMHP ****	%	100	100	5.000.000.000	100	5.500.000.000	100	4.800.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					5.000.000.000		5.500.000.000		4.800.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	1	1	5.000.000.000	1	5.500.000.000	1	4.800.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	JEPARA RSUD dr. REHATTA

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ***					100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan di RSUD dr. Rehatta		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD dr. REHATTA ***	%	30	40	100.000.000	45	105.000.000	50	110.000.000	55	115.000.000	60	120.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Terlaksananya Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi ****	Kegiatan	5	5	100.000.000	5	105.000.000	5	110.000.000	5	115.000.000	5	120.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat *****	Orang	100	160	100.000.000	170	105.000.000	180	110.000.000	190	115.000.000	200	120.000.000	SUBBAG PROGRAM	JEPARA RSUD dr. REHATTA
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ***					180.000.000		190.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masayarakat di RSUD dr. Rehatta		Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. REHATTA ***	%	100	31	180.000.000	32	190.000.000	33	200.000.000	34	210.000.000	35	220.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ****					180.000.000		190.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000	RSUD dr. REHATTA	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Advokasi pemberdayaan kemitraan, peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah penerima kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS Rehatta ****	Orang	350	590	180.000.000	780	190.000.000	1040	200.000.000	1400	210.000.000	1900	220.000.000	RSUD dr. REHATTA	
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****					180.000.000		190.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****	Dokumen	4	4	180.000.000	4	190.000.000	4	200.000.000	4	210.000.000	4	220.000.000	SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	JEPARA RSUD dr. REHATTA
RSJD Dr. AMINO																		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *								144.435.292.000		146.050.295.000		147.410.448.000		148.950.903.000		150.534.993.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan *	Angka	79,81	84,5		85		85,5		86		86,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSJD Dr. Amino Gondohutomo **							144.431.292.000		146.046.295.000		147.406.448.000		148.946.903.000		150.524.993.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) RSJD Dr. Amino Gondohutomo **	Angka	92,75	92,76	144.431.292.000	92,77	146.046.295.000	92,78	147.406.448.000	92,79	148.946.903.000	92,8	150.524.993.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					144.431.292.000		146.046.295.000		147.406.448.000		148.946.903.000		150.524.993.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo		Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo ***	%	37	37	60.474.000.000	37	61.811.000.000	38	63.281.000.000	38	64.793.000.000	38	66.341.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Peningkatan Pelayanan BLUD ****					60.474.000.000		61.811.000.000		63.281.000.000		64.793.000.000		66.341.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Meningkatnya kualitas pelayanan BLUD		CRR Parsial RSJD Dr. Amino Gondohutomo ****	%	92,95	93	60.474.000.000	94	61.811.000.000	94	63.281.000.000	95	64.793.000.000	95	66.341.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD *****					60.474.000.000		61.811.000.000		63.281.000.000		64.793.000.000		66.341.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan *****	Unit Kerja	1	6	60.474.000.000	6	61.811.000.000	6	63.281.000.000	6	64.793.000.000	6	66.341.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD Dr. Amino Gondohutomo		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo ***	%	100	100	83.957.292.000	100	84.235.295.000	100	84.125.448.000	100	84.153.903.000	100	84.183.993.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					83.953.292.000		83.970.295.000		84.121.448.000		84.149.903.000		84.175.993.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	83.953.292.000	12	83.970.295.000	12	84.121.448.000	12	84.149.903.000	12	84.175.993.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					83.948.292.000		83.965.295.000		84.116.448.000		84.144.903.000		84.170.993.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	457	520	83.948.292.000	520	83.965.295.000	520	84.116.448.000	520	84.144.903.000	520	84.170.993.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN AKUNTANSI	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****					2.000.000		263.000.000		2.000.000		2.000.000		3.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	2.000.000	100	263.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	3.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****					0		261.000.000		0		0		0	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	0	1	261.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		3.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		5.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	5.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		5.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSJD Dr. Amino Gondohutomo **							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		10.000.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Manajemen Risiko RSJD Dr. Amino Gondohutomo **	Angka	2,693	2,76	4.000.000	2,77	4.000.000	2,78	4.000.000	2,79	4.000.000	2,8	10.000.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		10.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di RSJD Dr. Amino Gondohutomo		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo ***	%	100	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	10.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		10.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	10.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		5.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		5.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	3	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	5.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas kesehatan *								7.065.000.000		6.965.000.000		7.135.000.000		7.140.000.000		21.165.000.000	Dinas Kesehatan	
				Usia Harapan Hidup (UHH) *	Tahun	74,93	75,46		75,68		75,9		76,12		76,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo **							7.065.000.000		6.965.000.000		7.135.000.000		7.140.000.000		21.165.000.000	Dinas Kesehatan	
				Net Death Rate (NDR) RSJD Dr. Amino Gondohutomo **	Permil	4,07	4,02	7.065.000.000	3,98	6.965.000.000	3,96	7.135.000.000	3,92	7.140.000.000	3,9	21.165.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					6.600.000.000		6.500.000.000		6.560.000.000		6.560.000.000		20.480.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo		Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo ***	%	100	100	2.200.000.000	100	2.200.000.000	100	2.200.000.000	100	2.200.000.000	100	8.600.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		8.400.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan ****	%	100	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	8.400.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Pengembangan Rumah Sakit *****					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		8.400.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit *****	Unit	1	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	8.400.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	KOTA SEMARANG RSJD Dr. Amino Gondohutomo
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan layanan kesehatan ****	%	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit *****					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit *****	Dokumen	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	KOTA SEMARANG RSJD Dr. Amino Gondohutomo
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo		Persentase Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo ***	%	100	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	6.000.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		6.000.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS ****	%	100	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	6.000.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		6.000.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan *****	Unit	38	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	5	6.000.000.000	POKJA PELAYANAN RAWAT INAP	KOTA SEMARANG RSJD Dr. Amino Gondohutomo
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo		Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan RS di RSJD Dr. Amino Gondohutomo ***	%	100	100	2.100.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	5.500.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					2.100.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		5.500.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan dan BMHP ****	%	N/A	100	1.100.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	3.500.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					2.200.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		7.000.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	N/A	1	1.100.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	3.500.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	KOTA SEMARANG RSJD Dr. Amino Gondohutomo
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan BHP ****	%	N/A	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersedianya Bahan Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah bahan habis pakai, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan *****	Paket	N/A	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000	SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	KOTA SEMARANG RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo		Persentase pasien jiwa bunuh diri di RSJD Dr. Amino Gondohutomo ***	%	N/A	N/A	300.000.000	N/A	300.000.000	N/A	360.000.000	N/A	360.000.000	N/A	380.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					300.000.000		300.000.000		360.000.000		360.000.000		380.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pasien Jiwa yang Berisiko Bunuh Diri yang Melakukan Tindakan Bunuh Diri di RSJD Dr. Amino Gondohutomo ****	%	N/A	N/A	300.000.000	N/A	300.000.000	N/A	360.000.000	N/A	360.000.000	N/A	380.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) *****					300.000.000		300.000.000		360.000.000		360.000.000		380.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) *****	Dokumen	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	220.000.000	4	220.000.000	4	225.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT INAP	KOTA SEMARANG RSJD Dr. Amino Gondohutomo
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa Rawat Jalan (Rajal) *****	Dokumen	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	4	155.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT JALAN	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ***					325.000.000		325.000.000		375.000.000		375.000.000		425.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSJD Dr. Amino Gondohutomo ***	%	20,67	86,72	325.000.000	86,76	325.000.000	86,8	375.000.000	87	375.000.000	87	425.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					325.000.000		325.000.000		375.000.000		375.000.000		425.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi ****	Kegiatan	5	5	325.000.000	5	325.000.000	5	375.000.000	5	375.000.000	5	425.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					325.000.000		325.000.000		375.000.000		375.000.000		425.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat *****	Orang	110	437	325.000.000	437	325.000.000	438	375.000.000	439	375.000.000	439	425.000.000	SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	KOTA SEMARANG RSJD Dr. Amino Gondohutomo
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ***					140.000.000		140.000.000		200.000.000		205.000.000		260.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo		Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo ***	%	5	10	125.000.000	15	125.000.000	20	175.000.000	25	175.000.000	30	225.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ****					125.000.000		125.000.000		175.000.000		175.000.000		225.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Terlaksananya Advokasi pemberdayaan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi		Jumlah penerima kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS ****	Orang	630	765	125.000.000	879	125.000.000	1055	175.000.000	1319	175.000.000	1714	225.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****					125.000.000		125.000.000		175.000.000		175.000.000		225.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****	Dokumen	4	4	125.000.000	4	125.000.000	4	175.000.000	4	175.000.000	4	225.000.000	POKJA PELAYANAN RAWAT JALAN	KOTA SEMARANG RSJD Dr. Amino Gondohutomo
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo		Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo ***	%	5	10	15.000.000	15	15.000.000	20	25.000.000	25	30.000.000	30	35.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi ****					15.000.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Terlaksananya Advokasi pemberdayaan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi		Jumlah penerima kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh RS ****	Orang	630	765	15.000.000	879	15.000.000	1055	25.000.000	1319	30.000.000	1714	35.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat *****					15.000.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat *****	Dokumen	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA SEMARANG RSJD Dr. Amino Gondohutomo
RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN																		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *								133.212.159.000		141.292.937.000		144.677.307.000		146.531.836.000		160.805.482.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan *	Angka	79,81	84,5		85		85,5		86		86,5		Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN **							133.187.159.000		141.267.937.000		144.650.307.000		146.511.836.000		160.775.482.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSJD dr. ARIF ZAINUDIN **	Angka	90,72	90,85	133.187.159.000	91	141.267.937.000	91,1	144.650.307.000	91,25	146.511.836.000	91,3	160.775.482.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					133.187.159.000		141.267.937.000		144.650.307.000		146.511.836.000		160.775.482.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN		Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD dr. ARIF ZAINUDIN ***	%	33	33,01	52.393.000.000	33,02	57.789.000.000	33,03	63.741.000.000	33,04	70.307.000.000	33,05	77.548.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Peningkatan Pelayanan BLUD ****					52.393.000.000		57.789.000.000		63.741.000.000		70.307.000.000		77.548.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Meningkatnya pelayanan BLUD		CRR Parsial RSJD Dr. Arif Zainudin ****	%	95	95,3	52.393.000.000	95,6	57.789.000.000	95,9	63.741.000.000	96,2	70.307.000.000	96,5	77.548.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD *****					52.393.000.000		57.789.000.000		63.741.000.000		70.307.000.000		77.548.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan *****	Unit Kerja	6	6	52.393.000.000	6	57.789.000.000	6	63.741.000.000	6	70.307.000.000	6	77.548.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN ***	%	100	100	80.794.159.000	100	83.478.937.000	100	80.909.307.000	100	76.204.836.000	100	83.227.482.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					80.749.159.000		83.237.337.000		80.839.307.000		76.184.836.000		83.147.482.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	5	80.749.159.000	5	83.237.337.000	5	80.839.307.000	5	76.184.836.000	5	83.147.482.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					80.739.159.000		83.227.337.000		80.829.307.000		76.174.836.000		83.137.482.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	N/A	429	80.739.159.000	429	83.227.337.000	429	80.829.307.000	429	76.174.836.000	429	83.137.482.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	N/A	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	SUB BAGIAN AKUNTANSI	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****					20.000.000		201.600.000		30.000.000		10.000.000		30.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	20.000.000	100	201.600.000	100	30.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****					0		171.600.000		0		0		0	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	N/A	0	1	171.600.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****					20.000.000		30.000.000		30.000.000		10.000.000		30.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					25.000.000		40.000.000		40.000.000		10.000.000		50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	25.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					25.000.000		40.000.000		40.000.000		10.000.000		50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN **							25.000.000		25.000.000		27.000.000		20.000.000		30.000.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Manajemen Risiko RSJD dr. ARIF ZAINUDIN **	Angka	2,96	3	25.000.000	3,05	25.000.000	3,07	27.000.000	3,09	20.000.000	3,1	30.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					25.000.000		25.000.000		27.000.000		20.000.000		30.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN ***	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	20.000.000	100	30.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****					25.000.000		25.000.000		27.000.000		20.000.000		30.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	20.000.000	100	30.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****					10.000.000		10.000.000		12.000.000		10.000.000		15.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	N/A	7	10.000.000	7	10.000.000	7	12.000.000	7	10.000.000	7	15.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****					15.000.000		15.000.000		15.000.000		10.000.000		15.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	N/A	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	10.000.000	5	15.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas kesehatan *								10.503.968.000		2.683.098.000		738.489.000		338.118.000		751.467.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Usia Harapan Hidup (UHH) *	Tahun	74,93	75,46		75,68		75,9		76,12		76,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN **							10.503.968.000		2.683.098.000		738.489.000		338.118.000		751.467.000	Dinas Kesehatan	
				Net Death Rate (NDR) RSJD dr. ARIF ZAINUDIN **	Permil	3,09	2,98	10.503.968.000	2,96	2.683.098.000	2,94	738.489.000	2,92	338.118.000	2,9	751.467.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					9.793.968.000		1.948.098.000		200.000.000		120.000.000		200.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin		Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN ***	%	100	100	6.748.968.000	100	1.000.000.000	100	50.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					6.748.968.000		1.000.000.000		50.000.000		25.000.000		50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan ****	%	100	100	6.748.968.000	100	1.000.000.000	100	50.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Pengembangan Rumah Sakit *****					6.748.968.000		1.000.000.000		50.000.000		25.000.000		50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit *****	Unit	N/A	2	6.748.968.000	2	1.000.000.000	2	50.000.000	2	25.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	KOTA SURAKARTA RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
		Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin		Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN ***	%	100	100	1.500.000.000	100	500.000.000	100	50.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					1.500.000.000		500.000.000		50.000.000		25.000.000		50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS ****	%	N/A	100	1.500.000.000	100	500.000.000	100	50.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					1.500.000.000		500.000.000		50.000.000		25.000.000		50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan *****	Unit	47	2	1.500.000.000	2	500.000.000	2	50.000.000	2	25.000.000	2	50.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	KOTA SURAKARTA RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin		Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN ***	%	100	100	1.500.000.000	100	403.098.000	100	50.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					1.500.000.000		403.098.000		50.000.000		25.000.000		50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan, BHP, BMHP, dan makan minum pasien ****	%	100	100	1.500.000.000	100	403.098.000	100	50.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					1.500.000.000		403.098.000		50.000.000		25.000.000		50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	N/A	25	1.500.000.000	25	403.098.000	25	50.000.000	25	25.000.000	25	50.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
		Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin		Persentase pasien bunuh diri di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN ***	%	N/A	N/A	15.000.000	N/A	15.000.000	N/A	20.000.000	N/A	15.000.000	N/A	20.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					15.000.000		15.000.000		20.000.000		15.000.000		20.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pasien Jiwa yang Berisiko Bunuh Diri yang Melakukan Tindakan Bunuh Diri ****	%	N/A	N/A	15.000.000	N/A	15.000.000	N/A	20.000.000	N/A	15.000.000	N/A	20.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) *****					15.000.000		15.000.000		20.000.000		15.000.000		20.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) *****	Dokumen	N/A	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT JALAN	KOTA SURAKARTA RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
		Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin		Persentase Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN ***	%	N/A	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan ****	%	N/A	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar *****	Unit	N/A	500	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	KOTA SURAKARTA RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin		Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD dr. ARIF ZAINUDIN ***	%	95	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan ****	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *****	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	POKJA PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	KOTA SURAKARTA RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis *****	Orang	60	60	10.000.000	60	10.000.000	60	10.000.000	60	10.000.000	60	10.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT INAP	KOTA SURAKARTA RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ***					530.000.000		530.000.000		363.489.000		103.118.000		376.467.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSJD Dr. Arif Zainudin		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN ***	%	100	60	530.000.000	60	530.000.000	60	363.489.000	60	103.118.000	60	376.467.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					530.000.000		530.000.000		363.489.000		103.118.000		376.467.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Terlaksananya Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi ****	Kegiatan	5	5	530.000.000	5	530.000.000	5	363.489.000	5	103.118.000	5	376.467.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					530.000.000		530.000.000		363.489.000		103.118.000		376.467.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat *****	Orang	N/A	200	530.000.000	200	530.000.000	200	363.489.000	200	103.118.000	200	376.467.000	SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	KOTA SURAKARTA RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ***					180.000.000		205.000.000		175.000.000		115.000.000		175.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Meningkatnya promosi dan advokasi masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin		Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD dr. ARIF ZAINUDIN ***	%	100	100	50.000.000	100	60.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ****					50.000.000		60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya advokasi pemberdayaan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi		Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS ****	Kegiatan	N/A	4	50.000.000	4	60.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****					50.000.000		60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****	Dokumen	N/A	4	50.000.000	4	60.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOTA SURAKARTA RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
		Meningkatnya promosi dan advokasi masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin		Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD dr. ARIF ZAINUDIN ***	%	100	100	130.000.000	100	145.000.000	100	125.000.000	100	65.000.000	100	125.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi ****					130.000.000		145.000.000		125.000.000		65.000.000		125.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		Terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah provinsi		Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan Rumah Sakit ****	Kegiatan	N/A	5	130.000.000	5	145.000.000	5	125.000.000	5	65.000.000	5	125.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat *****					130.000.000		145.000.000		125.000.000		65.000.000		125.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat *****	Dokumen	N/A	4	130.000.000	4	145.000.000	4	125.000.000	4	65.000.000	4	125.000.000	POKJA PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	KOTA SURAKARTA RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI																		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *								110.840.000.000		116.205.000.000		118.410.000.000		121.315.000.000		124.270.000.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan *	Angka	79,81	84,5		85		85,5		86		86,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi **							110.800.000.000		116.165.000.000		118.370.000.000		121.275.000.000		124.230.000.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi **	Angka	90,234	91,1	110.800.000.000	91,2	116.165.000.000	91,3	118.370.000.000	91,4	121.275.000.000	91,5	124.230.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					110.800.000.000		116.165.000.000		118.370.000.000		121.275.000.000		124.230.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi		Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ***	%	47,71	40,88	59.240.000.000	43,92	63.900.000.000	41,04	65.600.000.000	42,49	68.000.000.000	43,94	70.250.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Peningkatan Pelayanan BLUD ****					59.240.000.000		63.900.000.000		65.600.000.000		68.000.000.000		70.250.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD		CRR Parsial RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ****	%	94,9	94,94	59.240.000.000	95,31	63.900.000.000	95,43	65.600.000.000	95,59	68.000.000.000	95,73	70.250.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD *****					59.240.000.000		63.900.000.000		65.600.000.000		68.000.000.000		70.250.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan *****	Unit Kerja	1	1	59.240.000.000	1	63.900.000.000	1	65.600.000.000	1	68.000.000.000	1	70.250.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	KLATEN OPD Provinsi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ***	%	100	100	51.560.000.000	100	52.265.000.000	100	52.770.000.000	100	53.275.000.000	100	53.980.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					51.050.000.000		51.555.000.000		52.260.000.000		52.765.000.000		53.470.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	51.050.000.000	12	51.555.000.000	12	52.260.000.000	12	52.765.000.000	12	53.470.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					51.000.000.000		51.500.000.000		52.200.000.000		52.700.000.000		53.400.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	330	358	51.000.000.000	358	51.500.000.000	358	52.200.000.000	358	52.700.000.000	358	53.400.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	KLATEN OPD Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	12	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN AKUNTANSI	KLATEN OPD Provinsi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****					10.000.000		210.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Layanan ****	%	100	100	10.000.000	100	210.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****					0		200.000.000		0		0		0	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	0	1	200.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	KLATEN OPD Provinsi
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	15	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	SUB BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	KLATEN OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang sesuai Standar Layanan ****	%	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	4	4	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000	SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	KLATEN OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi **							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Manajemen Risiko RSJD Dr. RM Soejarwadi **	Angka	3,065	3	40.000.000	3,1	40.000.000	3,11	40.000.000	3,12	40.000.000	3,13	40.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ***	%	N/A	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan perundangan ****	%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	10	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KLATEN OPD Provinsi
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	3	14	20.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KLATEN OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas kesehatan *								26.749.673.000		22.453.491.000		34.114.340.000		31.650.054.000		28.762.965.000	Dinas Kesehatan	
				Usia Harapan Hidup (UHH) *	Tahun	74,93	75,46		75,68		75,9		76,12		76,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi **							26.749.673.000		22.453.491.000		34.114.340.000		31.650.054.000		28.762.965.000	Dinas Kesehatan	
				Net Death Rate (NDR) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi **	Permil	13,19	13,05	26.749.673.000	13	22.453.491.000	12,95	34.114.340.000	12,9	31.650.054.000	12,85	28.762.965.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					25.649.673.000		21.303.491.000		32.914.340.000		30.400.054.000		27.462.965.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi		Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ***	%	100	100	14.000.000.000	100	9.000.000.000	100	15.000.000.000	100	12.000.000.000	100	8.000.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					14.000.000.000		9.000.000.000		15.000.000.000		12.000.000.000		8.000.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Unggulan ****	%	100	100	14.000.000.000	100	9.000.000.000	100	15.000.000.000	100	12.000.000.000	100	8.000.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Pengembangan Rumah Sakit *****					14.000.000.000		9.000.000.000		15.000.000.000		12.000.000.000		8.000.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit *****	Unit	2	6	14.000.000.000	7	9.000.000.000	5	15.000.000.000	6	12.000.000.000	2	8.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	KLATEN RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
		Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi		Persentase Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ***	%	100	100	829.673.000	100	920.351.000	100	6.154.340.000	100	6.570.054.000	100	6.762.965.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					829.673.000		920.351.000		6.154.340.000		6.570.054.000		6.762.965.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Penyediaan Alat Kesehatan untuk Mendukung Pelayanan Unggulan RS ****	%	100	100	529.673.000	100	620.351.000	100	5.854.340.000	100	5.070.054.000	100	5.262.965.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					529.673.000		620.351.000		5.854.340.000		5.070.054.000		5.262.965.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan *****	Unit	13	10	529.673.000	60	620.351.000	10	5.854.340.000	10	5.070.054.000	3	5.262.965.000	Pokja Pelayanan Rawat Inap	KLATEN RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan ****	%	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar *****	Unit	N/A	500	300.000.000	500	300.000.000	500	300.000.000	500	1.500.000.000	500	1.500.000.000	SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	KLATEN RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
		Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi		Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Layanan RS di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ***	%	100	100	10.800.000.000	100	11.363.140.000	100	11.740.000.000	100	11.810.000.000	100	12.680.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					10.800.000.000		11.363.140.000		11.740.000.000		11.810.000.000		12.680.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Pelayanan Obat - Obatan dan BMHP ****	%	100	100	6.500.000.000	100	7.000.000.000	100	7.500.000.000	100	8.000.000.000	100	8.500.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					13.000.000.000		14.000.000.000		15.000.000.000		16.000.000.000		17.000.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	3	2	6.500.000.000	2	7.000.000.000	2	7.500.000.000	2	8.000.000.000	2	8.500.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	KLATEN RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Pelayanan BHP dan makanan dan minuman ****	%	100	100	4.300.000.000	100	4.363.140.000	100	4.240.000.000	100	3.810.000.000	100	4.180.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					8.600.000.000		8.726.280.000		8.480.000.000		7.620.000.000		8.360.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Tersedianya Bahan Habis Pakai dan Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah bahan habis pakai dan makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan *****	Paket	N/A	2	4.300.000.000	2	4.363.140.000	2	4.240.000.000	2	3.810.000.000	2	4.180.000.000	SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	KLATEN RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
		Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi		Persentase Pasien Bunuh Diri di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ***	%	N/A	N/A	20.000.000	N/A	20.000.000	N/A	20.000.000	N/A	20.000.000	N/A	20.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pasien Jiwa yang Berisiko Bunuh Diri yang Melakukan Tindakan Bunuh Diri di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ****	%	N/A	N/A	20.000.000	N/A	20.000.000	N/A	20.000.000	N/A	20.000.000	N/A	20.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) *****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) *****	Dokumen	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT INAP	KLATEN RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Rawat Jalan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Rawat Jalan *****	Dokumen	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT JALAN	KLATEN RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ***					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ***	%	98	98,5	500.000.000	98,5	500.000.000	99	500.000.000	99	500.000.000	99	500.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK		Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan dalam Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ****	Kegiatan	6	11	500.000.000	12	500.000.000	13	500.000.000	14	500.000.000	14	500.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat *****	Orang	454	473	500.000.000	473	500.000.000	476	500.000.000	476	500.000.000	476	500.000.000	SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	KLATEN RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ***					600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi Masyarakat di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi		Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ***	%	N/A	4,44	500.000.000	6,38	550.000.000	8	600.000.000	9,26	650.000.000	10	700.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ****					500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Terlaksananya Advokasi Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah penerima kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh rumah sakit ****	Orang	1100	1175	500.000.000	1250	550.000.000	1350	600.000.000	1475	650.000.000	1625	700.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****					500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****	Dokumen	7	7	500.000.000	7	550.000.000	7	600.000.000	7	650.000.000	7	700.000.000	Pokja Pelayanan Rawat Jalan	KLATEN RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi Masyarakat di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi		Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ***	%	N/A	5,58	100.000.000	5,74	100.000.000	5,91	100.000.000	5,96	100.000.000	6,07	100.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi ****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pemerima kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh rumah sakit ****	Orang	12950	14380	100.000.000	15206	100.000.000	16105	100.000.000	17065	100.000.000	18100	100.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat *****					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat *****	Dokumen	N/A	48	100.000.000	48	100.000.000	48	100.000.000	48	100.000.000	48	100.000.000	SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KLATEN RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
RSMD SOEPARDJO ROESTAM																		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *								52.398.799.000		59.258.559.000		63.706.487.000		64.715.952.000		72.561.347.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan *	Angka	79,81	84,5		85		85,5		86		86,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam **							52.338.799.000		59.178.559.000		63.606.487.000		64.615.952.000		72.441.347.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam **	Angka	N/A	85,5	52.338.799.000	86	59.178.559.000	86,5	63.606.487.000	87	64.615.952.000	88,5	72.441.347.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					52.338.799.000		59.178.559.000		63.606.487.000		64.615.952.000		72.441.347.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam ***	%	N/A	100	52.338.799.000	100	59.178.559.000	100	63.606.487.000	100	64.615.952.000	100	72.441.347.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					27.100.000.000		30.105.000.000		32.110.000.000		32.760.000.000		36.015.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	4	27.100.000.000	4	30.105.000.000	4	32.110.000.000	4	32.760.000.000	4	36.015.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					17.000.000.000		18.000.000.000		19.000.000.000		19.350.000.000		21.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	N/A	160	17.000.000.000	160	18.000.000.000	160	19.000.000.000	160	19.350.000.000	160	21.000.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****					10.000.000.000		12.000.000.000		13.000.000.000		13.300.000.000		14.900.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	4	4	10.000.000.000	4	12.000.000.000	4	13.000.000.000	4	13.300.000.000	4	14.900.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****					40.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	4	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	55.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD *****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD *****	Dokumen	N/A	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	N/A	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****					20.000.000		21.000.000		21.000.000		23.000.000		25.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD ****	Dokumen	N/A	4	20.000.000	4	21.000.000	4	21.000.000	4	23.000.000	4	25.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****					20.000.000		21.000.000		21.000.000		23.000.000		25.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	20.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	23.000.000	1	25.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****					20.000.000		25.000.000		29.000.000		35.000.000		45.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	N/A	100	20.000.000	100	25.000.000	100	29.000.000	100	35.000.000	100	45.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****					20.000.000		25.000.000		29.000.000		35.000.000		45.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	10	20.000.000	10	25.000.000	10	29.000.000	10	35.000.000	10	45.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					6.903.000.000		10.123.000.000		12.491.487.000		12.842.952.000		15.900.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	6.903.000.000	100	10.123.000.000	100	12.491.487.000	100	12.842.952.000	100	15.900.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****					1.500.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		3.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	1.500.000.000	4	2.000.000.000	4	2.500.000.000	4	2.500.000.000	4	3.000.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					1.500.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		3.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	1.500.000.000	4	2.000.000.000	4	2.500.000.000	4	2.500.000.000	4	3.000.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					1.000.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	1.000.000.000	4	1.500.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	3.000.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					1.000.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		3.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	1.000.000.000	4	1.500.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	3.000.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****					500.000.000		1.500.000.000		1.750.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	4	4	500.000.000	4	1.500.000.000	4	1.750.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					600.000.000		760.000.000		800.000.000		900.000.000		950.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	600.000.000	4	760.000.000	4	800.000.000	4	900.000.000	4	950.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					803.000.000		863.000.000		941.487.000		942.952.000		950.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	803.000.000	4	863.000.000	4	941.487.000	4	942.952.000	4	950.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****					4.750.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Mebel, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Mebel, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****	Unit	N/A	4	4.750.000.000	4	3.250.000.000	4	3.250.000.000	4	3.500.000.000	4	3.500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Pengadaan Mebel *****					2.000.000.000		1.000.000.000		750.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	2.000.000.000	4	1.000.000.000	4	750.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					1.000.000.000		750.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	10	1.000.000.000	10	750.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****					1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	4	1.000.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					750.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	12	750.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					9.505.799.000		11.004.559.000		11.755.000.000		11.755.000.000		13.256.347.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. ****	Laporan	N/A	4	9.505.799.000	4	11.004.559.000	4	11.755.000.000	4	11.755.000.000	4	13.256.347.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					5.799.000		5.800.000		5.000.000		5.000.000		6.347.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	4	5.799.000	4	5.800.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	6.347.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****					5.000.000.000		5.498.759.000		6.000.000.000		6.000.000.000		7.500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	5.000.000.000	12	5.498.759.000	12	6.000.000.000	12	6.000.000.000	12	7.500.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					1.000.000.000		1.500.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	1.000.000.000	4	1.500.000.000	4	1.750.000.000	4	1.750.000.000	4	1.750.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****					3.500.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	3.500.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					4.040.000.000		4.650.000.000		3.950.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangkaPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangkaPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Unit	N/A	10	4.040.000.000	10	4.650.000.000	10	3.950.000.000	10	3.700.000.000	10	3.700.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					500.000.000		550.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Mebel *****					590.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	4	590.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					500.000.000		1.000.000.000		750.000.000		500.000.000		500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	4	500.000.000	4	1.000.000.000	4	750.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****					700.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	4	700.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					750.000.000		1.000.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	4	750.000.000	4	1.000.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam **							60.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		120.000.000	Dinas Kesehatan	
				Indeks Manajemen Risiko Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam **	Angka	N/A	2,75	60.000.000	2,8	80.000.000	2,85	100.000.000	2,9	100.000.000	3	120.000.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					60.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		120.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam ***	%	N/A	100	60.000.000	100	80.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	120.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****					60.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		120.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan perundangan ****	%	N/A	N/A	60.000.000	N/A	80.000.000	N/A	100.000.000	N/A	100.000.000	N/A	120.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****					30.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	N/A	4	30.000.000	4	40.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****					30.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	N/A	4	30.000.000	4	40.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
Meningkatkan kualitas kesehatan *								37.400.000.000		48.500.000.000		49.440.000.000		49.562.000.000		53.144.400.000	Dinas Kesehatan	
				Usia Harapan Hidup (UHH) *	Tahun	74,93	75,46		75,68		75,9		76,12		76,5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam **							37.400.000.000		48.500.000.000		49.440.000.000		49.562.000.000		53.144.400.000	Dinas Kesehatan	
				Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam **	Permil	33,34	33,1	37.400.000.000	33	48.500.000.000	32,9	49.440.000.000	32,8	49.562.000.000	32,7	53.144.400.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ***					34.100.000.000		42.650.000.000		43.570.000.000		43.687.000.000		45.600.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam		Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam ***	%	N/A	60	2.000.000.000	70	2.250.000.000	75	2.000.000.000	80	2.000.000.000	85	2.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					2.000.000.000		2.250.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan ****	%	N/A	100	2.000.000.000	100	2.250.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya *****					1.000.000.000		1.250.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar *****	Unit	N/A	4	1.000.000.000	4	1.250.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	Seksi Penunjang Non Medis	KOTA SEMARANG Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit *****					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit *****	Unit	N/A	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	Seksi Penunjang Non Medis	KOTA SEMARANG Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
			Pengembangan Rumah Sakit *****					0		0		0		0		0	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Seksi Penunjang Non Medis	KOTA SEMARANG Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam		Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/alat penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam ***	%	N/A	60	22.900.000.000	70	30.200.000.000	75	31.070.000.000	80	31.125.000.000	85	32.500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					22.900.000.000		30.200.000.000		31.070.000.000		31.125.000.000		32.500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS ****	%	N/A	100	20.000.000.000	100	27.000.000.000	100	27.700.000.000	100	27.750.000.000	100	29.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					20.000.000.000		27.000.000.000		27.700.000.000		27.750.000.000		29.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	2	20.000.000.000	2	27.000.000.000	2	27.700.000.000	2	27.750.000.000	2	29.000.000.000	Seksi Pelayanan Medis	KOTA SEMARANG Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan" ****	%	N/A	100	2.900.000.000	100	3.200.000.000	100	3.370.000.000	100	3.375.000.000	100	3.500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan *****					2.900.000.000		3.200.000.000		3.370.000.000		3.375.000.000		3.500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar *****	Unit	N/A	10	2.900.000.000	20	3.200.000.000	20	3.370.000.000	20	3.375.000.000	20	3.500.000.000	Seksi Penunjang Non Medis	KOTA SEMARANG Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Presentase penyediaan barang operasional RS yang mendukungpelayanan RSMK ****	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit *****					0		0		0		0		0	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Seksi Penunjang Non Medis	KOTA SEMARANG Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam		Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam sesuai standar ***	%	N/A	100	6.200.000.000	100	7.200.000.000	100	7.500.000.000	100	7.562.000.000	100	8.100.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					5.000.000.000		6.000.000.000		6.200.000.000		6.262.000.000		6.500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan ****	%	N/A	100	5.000.000.000	100	6.000.000.000	100	6.200.000.000	100	6.262.000.000	100	6.500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *****					5.000.000.000		6.000.000.000		6.200.000.000		6.262.000.000		6.500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan *****	Paket	4	4	5.000.000.000	4	6.000.000.000	4	6.200.000.000	4	6.262.000.000	4	6.500.000.000	Seksi Penunjang Medis	KOTA SEMARANG Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					1.200.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.600.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya proses pelayanan medis yang berkualitas		Persentase unit kerja pelayanan medis yang capaian indikator mutunya sesuai target ****	%	N/A	80	1.200.000.000	80	1.200.000.000	85	1.300.000.000	85	1.300.000.000	90	1.600.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *****					1.200.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.600.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan *****	Unit	N/A	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000	1	1.300.000.000	1	1.600.000.000	Seksi Keperawatan	KOTA SEMARANG Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam		Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam ***	%	N/A	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ****	%	N/A	N/A	2.000.000.000	N/A	2.000.000.000	N/A	2.000.000.000	N/A	2.000.000.000	N/A	2.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan *****					0		0		0		0		0	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya *****					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya *****	Dokumen	N/A	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	Seksi Pelayanan Medis	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi ****					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah ketersediaan Telemedicine di RSMD Soepradjo Roestam ****	Paket	N/A	N/A	1.000.000.000	N/A	1.000.000.000	N/A	1.000.000.000	N/A	1.000.000.000	N/A	1.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan *****					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan *****	Dokumen	N/A	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	Seksi Penunjang Non Medis	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN ***					3.000.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		7.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam ***	%	N/A	30	3.000.000.000	40	5.500.000.000	50	5.500.000.000	60	5.500.000.000	70	7.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi ****					3.000.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		7.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi ****	Kegiatan	N/A	5	3.000.000.000	4	5.500.000.000	3	5.500.000.000	2	5.500.000.000	2	7.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan *****					3.000.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000		7.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat *****	Orang	N/A	20	3.000.000.000	20	5.500.000.000	20	5.500.000.000	20	5.500.000.000	20	7.000.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN ***					300.000.000		350.000.000		370.000.000		375.000.000		544.400.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam		Persentase kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dari Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam ***	%	N/A	100	300.000.000	100	350.000.000	100	370.000.000	100	375.000.000	100	544.400.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ****					300.000.000		350.000.000		370.000.000		375.000.000		544.400.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Terlaksananya Advokasi pemberdayaan kemitraan, peningkatan PSM dan LS		Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS ****	Kegiatan	N/A	4	300.000.000	5	350.000.000	5	370.000.000	5	375.000.000	5	544.400.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****					300.000.000		350.000.000		370.000.000		375.000.000		544.400.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi *****	Dokumen	N/A	4	300.000.000	5	350.000.000	5	370.000.000	5	375.000.000	5	544.400.000	Seksi Keperawatan	KOTA SEMARANG Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam

Tabel 4.2
Sub Kegiatan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5
1	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	1) Penyediaan Kontribusi Premi: 13.603.580 jiwa 2) Penyediaan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3: 11.000 jiwa 3) Penyediaan Buffer : 1.538.790 jiwa	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Percepatan Penanganan Stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi Balita dan Ibu Hamil	1) Penguatan Konvergensi Pencegahan Stunting 2) Fasilitasi Pelaksanaan Pemberian PMT Lokal 3) Pemeriksaan remaja risiko anemia 4) Pengadaan obat gizi 5) Pemberian PMT (dalam bentuk bantuan keuangan kab/kota) 6) Pemberian suplemen ibu hamil	1) Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi a) Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2) Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi a) Sub kegiatan: Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
		Bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pemantauan penanganan stunting	Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sub keg: Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Pelayanan Kesehatan Keliling Oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rumah Sakit Provinsi, dan Rumah Sakit Kab/Kota	1) Kegiatan: Advokasi pemberdayaan kemitraan peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi a) Sub keg: Peningkatan Upaya advokasi kesehatan	Dinas Kesehatan 8 RS Provinsi

NO	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PELAKSANA
			pemberdayaan penggalangan kemitraan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi 2) Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi a) Sub kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
4	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	1) Penyediaan 1 dokter di setiap Puskesmas pembantu 2) Penyediaan 1 bidan di setiap Puskesmas pembantu	1) Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi a) Sub keg: Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di Rumah Sakit	Penyediaan layanan *Fast track* untuk pasien dengan kriteria tertentu agar mendapatkan pelayanan rawat jalan dengan lebih cepat Memberikan antrian khusus pada pasien dengan kriteria tertentu (Ibu Hamil, Disabilitas, Lansia dengan Alat Bantu Mobilitas, Pensiunan dengan Alat Bantu Mobilitas, Anak Usia Dibawah 1 tahun, Kondisi Medis Tertentu Berdasarkan Rekomendasi Dokter)	1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD a) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	8 RS Provinsi
6	Pap smear gratis (Skrining Ca Cerviks)	Skrining IVA di Puskesmas dan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Spelling	1) Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan,	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PELAKSANA
			UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi a) Sub kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
7	Peningkatan operasional kader Posyandu	Pemberian insentif diberikan kepada 2 orang kader di pustu (@Rp500.000 per 3 bulan)	1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi a) Sub kegiatan: Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
8	Peningkatan kualitas hidup lansia	1) Peningkatan fasilitasi Posyandu lansia 2) Pemeriksaan kesehatan	1) Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi a) Sub kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
9	Mendukung Jawa Tengah Bebas Narkoba	Skrining Narkoba pada pengemudi, anak sekolah dan ASN Prov jateng	1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi a) Sub kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan
		Penyediaan layanan rehabilitasi NAPZA	1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,	RSJD Dr. Amino Gondohutomo

NO	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PELAKSANA
			Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi a) Sub Kegiatan Pengadaan obta, bahan habis Pakai, Bahan medis Habis pakai, Vaksin, makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSJD Dr. Arif Zainudin; RSJD Dr. RM. Soedjarwadi;
10	Perlindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah	Pemenuhan alat kesehatan melalui optimalisasi BLUD	1) Peningkatan pelayanan BLUD a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSJD Dr. Amino Gondohutomo RSJD Dr. Arif Zainudin; RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
11	Cek Kesehatan Gratis (CKG)	1) Cek Kesehatan Gratis untuk Balita, Anak Usia dua tahun, anak usia sekolah kelas 7 2) Skrining TB pada anak dan Dewasa	1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi a) Sub kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) b) Sub Kegiatan: Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
12	Jambanisasi 100%	Bantuan jamban untuk Masyarakat dalam bentuk Bantuan Keuangan	1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi a) Sub kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Kesehatan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya dan biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya indikator kinerja harus memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU Dinas Kesehatan, juga ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan 8 Rumah Sakit Provinsi tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir pada tabel 4.3. sedangkan indikator kinerja kunci pada table 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KESEHATAN										
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.59	74.93	75.24	75.46	75.68	75.90	76.12	76.50	76.50
2	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	N/A	N/A	22.86	28.57	34.28	40.00	45.71	51.43	51.43
3	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	N/A	N/A	50.00	52.00	54.00	56.00	58.00	60.00	60.00
4	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	%	N/A	22.80	28.50	34.30	40.00	45.70	51.40	57.10	57.10
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	94.54	98.83	99.03	99.23	99.43	99.63	99.83	99.90	99.90
6	Persentase Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian KLB, Bencana, dan Kesehatan Lingkungan	%	N/A	N/A	71.00	77.00	82.00	88.00	94.00	100.00	100.00
7	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	76.40	74.70	79.31	78.27	77.21	76.32	75.60	74.87	74.87
8	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1000 KH	9.28	8.57	8.75	8.66	8.57	8.48	8.40	8.32	8.32
9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	20.70	17.10	17.00	17.00	16.00	15.00	13.60	13.00	13.00
10	Persentase Penurunan Kasus Stunting	%	1.81	0.22	0.15	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.35
11	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	92.19	79.81	84.43	84.50	85.00	85.50	86.00	86.50	86.50

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RSUD DR. MOEWARDI										
1	Net Death rate (NDR) RSUD Dr. Moewardi	Permil	N/A	46.17	56.00	55.80	55.60	55.50	55.30	55.10	55.10
2	Indeks Manajemen Risiko RSUD Dr. Moewardi	Angka	N/A	2.90	2.95	3.00	3.00	3.05	3.05	3.10	3.10
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Dr. Moewardi	Angka	N/A	90.00	91.00	91.02	91.03	91.04	91.05	91.06	91.06
	RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO										
1	Net Death Rate(NDR) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Permil	N/A	30.14	30.14	30.13	30.13	30.12	30.12	30.11	30.11
2	Indeks Manajemen Risiko RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo	Angka	3.12	3.12	3.13	3.13	3.14	3.14	3.15	3.15	3.15
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Angka	85.50	86.00	86.50	86.75	87.00	87.25	87.50	87.75	87.75
	RSUD DR. ADHYATMA, MPH										
1	Net Death Rate (NDR) RSUD dr. Adhyatma, MPH	Permil	N/A	33.34	33.20	33.10	33.00	32.90	32.80	32.70	32.70
2	Indeks Manajemen Risiko RSUD dr. Adhyatma, MPH	Angka	N/A	2.90	3.00	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.05
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Adhyatma, MPH	Angka	94.08	94.08	94.08	94.08	94.08	94.08	94.08	94.08	94.08
	RSUD DR. REHATTA										
1	Net Death Rate (NDR) RSUD Dr Rehatta	Permil	N/A	11.00	10.90	10.80	10.70	10.60	10.50	10.40	10.40
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD DR Rehatta	Angka	78.22	85.20	90.00	90.01	90.02	90.03	90.04	90.05	90.05
3	Indeks Manajemen Risiko RSUD Dr. Rehatta	Angka	N/A	3.08	3.09	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.14

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO										
1	Net Death Rate (NDR) RSJD Dr Amino Gondohutomo	Permil	N/A	4.07	4.06	4.02	3.98	3.96	3.92	3.90	3.90
2	Indeks Manajemen Risiko RSJD Dr.Amino Gondohutomo	Angka	N/A	2.69	2.75	2.76	2.77	2.78	2.79	2.80	2.80
3	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) RSJD Dr Amino Gondohutomo	Angka	N/A	92.75	92.75	92.76	92.77	92.78	92.79	92.80	92.80
	RSJD DR. ARIF ZAINUDIN										
1	Net Death Rate (NDR) RSJD Dr Arif Zainudin	Permil	N/A	3.09	3.05	2.98	2.96	2.94	2.92	2.90	2.90
2	Indeks Manajemen Risiko RSJD Dr.Arif Zainudin	Angka	N/A	2.96	2.97	3.00	3.05	3.07	3.09	3.10	3.10
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSJD Dr.Arif Zainudin	Angka	89.58	90.72	90.75	90.85	91.00	91.10	91.25	91.30	91.30
	RSJD DR. RM. SOEDJARWADI										
1	Net Death Rate (NDR) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Permil	11.86	13.19	13.10	13.05	13.00	12.95	12.90	12.85	12.85
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSJD Dr RM Soejarwadi	Angka	87.11	90.23	91.00	91.10	91.20	91.30	91.40	91.50	91.50
3	Indeks Manajemen Risiko RSJD Dr. RM Soejarwadi	Angka	2.83	3.07	2.95	3.00	3.10	3.11	3.12	3.13	3.13
	RS MATA DAERAH SOEPARJO RUSTAM										
1	Net Death Rate (NDR) RS MATA DAERAH SOEPARDJO RUSTAM	Permil	N/A	33.34	33.20	33.10	33.00	32.90	32.80	32.70	32.70
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RS Mata Daerah Soepardjo Roestam	Angka	N/A	N/A	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00	88.50	88.50

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Indeks Manajemen Risiko RS Mata Daerah Soepardjo Roestam	Angka	N/A	N/A	2.70	2.75	2.80	2.85	2.90	3.00	3.00

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**										
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	NA	75.24	75.46	75.68	75.9	76.12	76.5	76.5	
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	74.70	79.31	78.27	77.21	76.32	75.60	74.87	74.87	
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	17.10	17.00	17.00	16.00	15.00	13.60	13.00	13.00	
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	92	92	93	93	94	94	94	
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	86	88	90	92	93	94	95	95	
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98.83	99.03	99.23	99.43	99.63	99.83	99.90	99.90	
E	**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**										
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar										
	Kesehatan										
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.93	75.24	75.46	75.68	75.90	76.12	76.50	76.50	
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	74.70	79.31	78.27	77.21	76.32	75.60	74.87	74.87	

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Angka Kematian Balita (AKBA)	per 100.000 KH	*12,14	12	11.8	11.6	11.4	11.2	11	11	
4	Angka populasi bebas PTM	%	N/A	50.00	52.00	54.00	56.00	58.00	60.00	60.00	
5	Angka populasi bebas PM	%	22.80	28.50	34.30	40.00	45.70	51.40	57.10	57.10	
6	Proporsi kabupaten/kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	N/A	22.86	28.57	34.28	40.00	45.71	51.43	51.43	
7	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian KLB dan Bencana	%	N/A	71.00	77.00	82.00	88.00	94.00	100.00	100.00	
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98.83	99.03	99.23	99.43	99.63	99.83	99.90	99.90	
9	Persentase Penurunan Kasus Stunting	%	0.22	0.15	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.35	
10	*Net Death Rate* (NDR) RSUD Dr. Moewardi	permil	46.17	56.00	55.80	55.60	55.50	55.30	55.10	55.10	
11	*Net Death Rate* (NDR) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	permil	30.14	30.14	30.13	30.13	30.12	30.12	30.11	30.11	
12	*Net Death Rate* (NDR) RSUD dr. Adhyatma, MPH	permil	33.34	33.20	33.10	33.00	32.90	32.80	32.70	32.70	
13	*Net Death Rate* (NDR) RSUD dr. Rehatta	permil	11.00	10.90	10.80	10.70	10.60	10.50	10.40	10.40	
14	*Net Death Rate* (NDR) RSJD Dr. Amino Gondohutomo	permil	4.07	4.06	4.02	3.98	3.96	3.92	3.90	3.90	
15	*Net Death Rate* (NDR) RSJD dr. Arif Zainudin	permil	3.09	3.05	2.98	2.96	2.94	2.92	2.90	2.90	
16	*Net Death Rate* (NDR) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	permil	13.19	13.10	13.05	13.00	12.95	12.90	12.85	12.85	
17	*Net Death Rate* (NDR) Rumah Sakit Khusus Mata	permil	33.34	33.20	33.10	33.00	32.90	32.80	32.70	32.70	
F	**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**										
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar										

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kesehatan										
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 1.000 Penduduk	1.24	1.3	1.5	1.7	1.8	2	2.1	2.1	
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan bahwa SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang Kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM Kesehatan sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan

SPM Kesehatan merupakan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam urusan kesehatan yang menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan Pelayanan Dasar kepada warga negara dan merupakan bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi Kepala Daerah. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi; dan
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.

Pada tabel 4.4 dapat dilihat indikator dan target SPM Kesehatan Daerah Provinsi sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja SPM	*Baseline Tahun*		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SPM Kesehatan Provinsi									
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.	100	100	100	100	100	100	100	100	
	SPM dalam Renstra									
1	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan surveilans kesehatan dan pelayanan kesehatan pencegahan dan pengendalian KLB, bencana, dan kesehatan lingkungan	NA	NA	71	77	82	88	94	100	
2	Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/ wabah dan bencana	NA	48	40	50	60	65	70	75	
3	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja SPM	*Baseline* Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB, dan krisis kesehatan akibat bencana	66	71	74	78	86	94	100	100	
8	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan Bencana di wilker Balkesmas Ambarawa	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan Bencana di wilker Balkesmas Magelang	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan Bencana di wilker Balkesmas Klaten	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan Bencana di wilker Balkesmas Pati	100	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan dan 4 Rumah Sakit Umum, 3 Rumah Sakit Jiwa serta 1 RS Khusus Mata untuk lima tahun mendatang sampai tahun 2029. Renstra juga disusun tidak saja sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi juga dijadikan pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama tiga tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan 8 (delapan) Rumah Sakit Provinsi, baik citra aparatur, masyarakat dan lingkungan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat mewujudkan tujuan Masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera dan Lestari.

Agenda-agenda strategis pembangunan kesehatan harus dijadikan acuan dasar unit kerja terkait dan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran di unit kerjanya, sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan secara bersama-sama.

Pada saat RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 disusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga menyesuaikan RPJMD dan ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2025 sampai tahun 2029 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan mengacu RPJMN tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah dan panduan yang lebih rinci dan terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan, selaras dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra OPD dilingkup Provinsi Jawa Tengah, dan melakukan fasilitasi pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

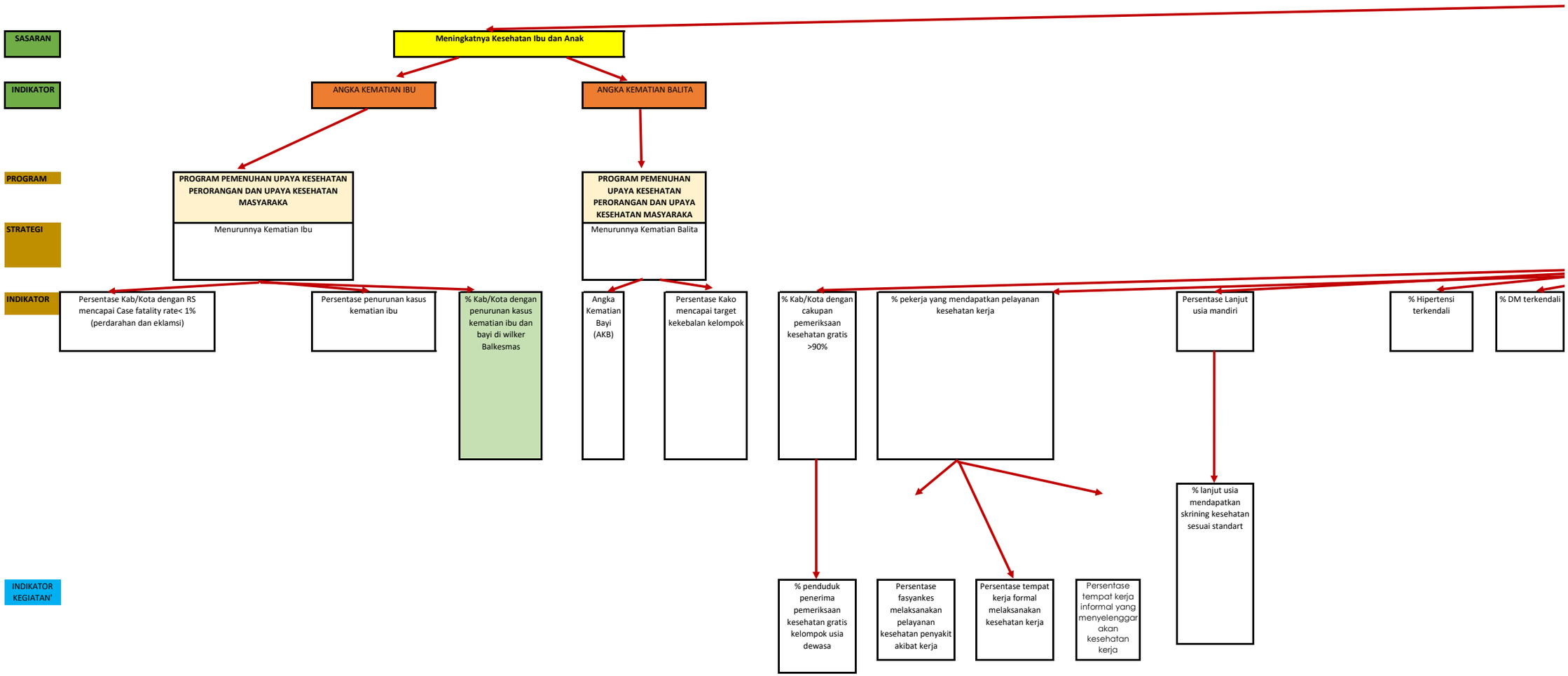
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM
STRATEGI
INDIKATOR
INDIKATOR KEGIATAN'
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak
ANGKA KEMATIAN IBU
ANGKA KEMATIAN BALITA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA
Menurunnya Kematian Ibu
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA
Menurunnya Kematian Balita
Persentase Kab/Kota dengan RS mencapai Case fatality rate< 1% (perdarahan dan eklamsi)
Persentase penurunan kasus kematian ibu
% Kab/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu dan bayi di wilker Balkesmas
Angka Kematian Bayi (AKB)
Persentase Kako mencapai target kekebalan kelompok
% Kab/Kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >90%
% pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja
Persentase Lanjut usia mandiri
% Hipertensi terkendali
% DM terkendali
% penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa
Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja
Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja
Persentase tempat kerja informal yang menyelenggarakan kesehatan kerja
% lanjut usia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart

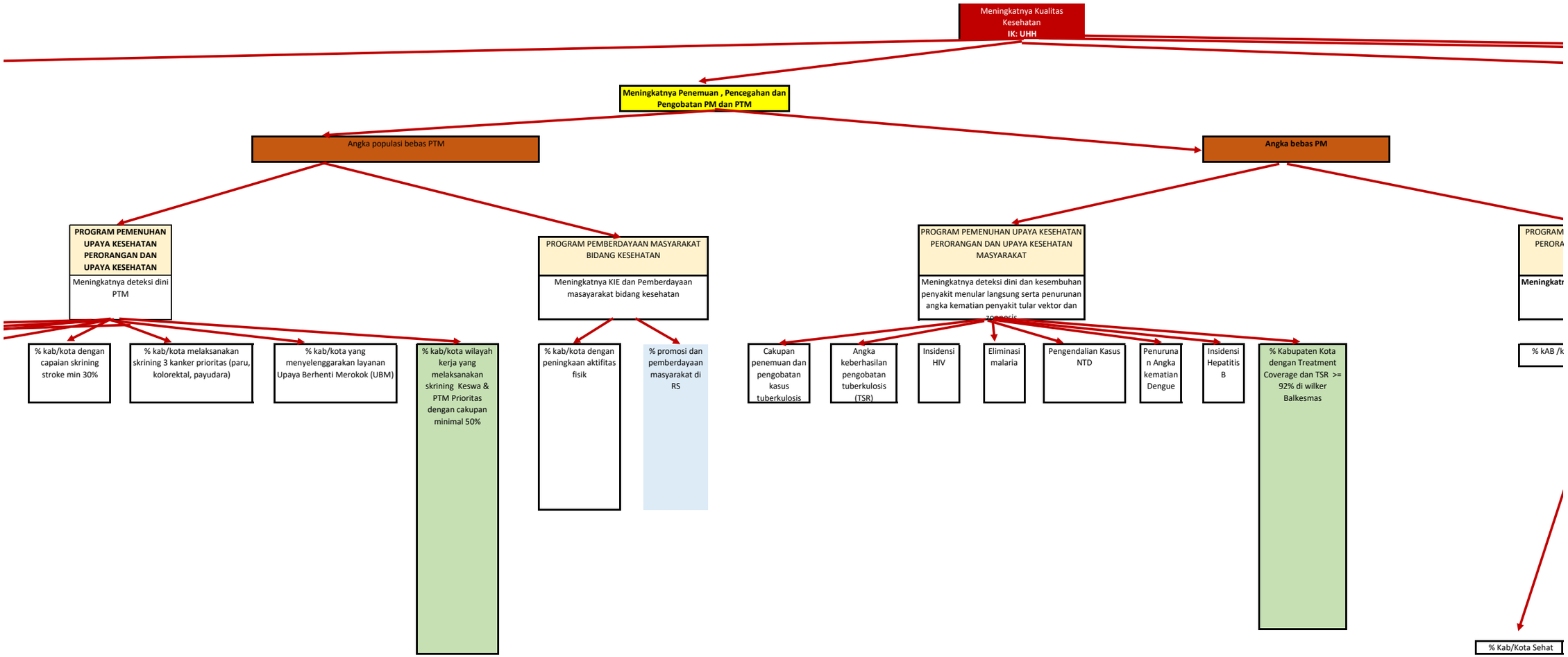
Meningkatnya Kualitas Kesehatan
IK: UHH
Meningkatnya Penemuan , Pencegahan dan Pengobatan PM dan PTM
Angka populasi bebas PTM
Angka bebas PM
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
Meningkatnya deteksi dini PTM
% kab/kota dengan capaian skrining stroke min 30%
% kab/kota melaksanakan skrining 3 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara)
% kab/kota yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)
% kab/kota wilayah kerja yang melaksanakan skrining Keswa & PTM Prioritas dengan cakupan minimal 50%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Meningkatnya KIE dan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
% kab/kota dengan peningkaan aktifitas fisik
% promosi dan pemberdayaan masyarakat di RS
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Meningkatnya deteksi dini dan kesembuhan penyakit menular langsung serta penurunan angka kematian penyakit tular vektor dan
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR)
Insidensi HIV
Eliminasi malaria
Pengendalian Kasus NTD
Penurunan Angka kematian Dengue
Insidensi Hepatitis B
% Kabupaten Kota dengan Treatment Coverage dan TSR >= 92% di wilker Balkesmas
% Kab/Kota Sehat

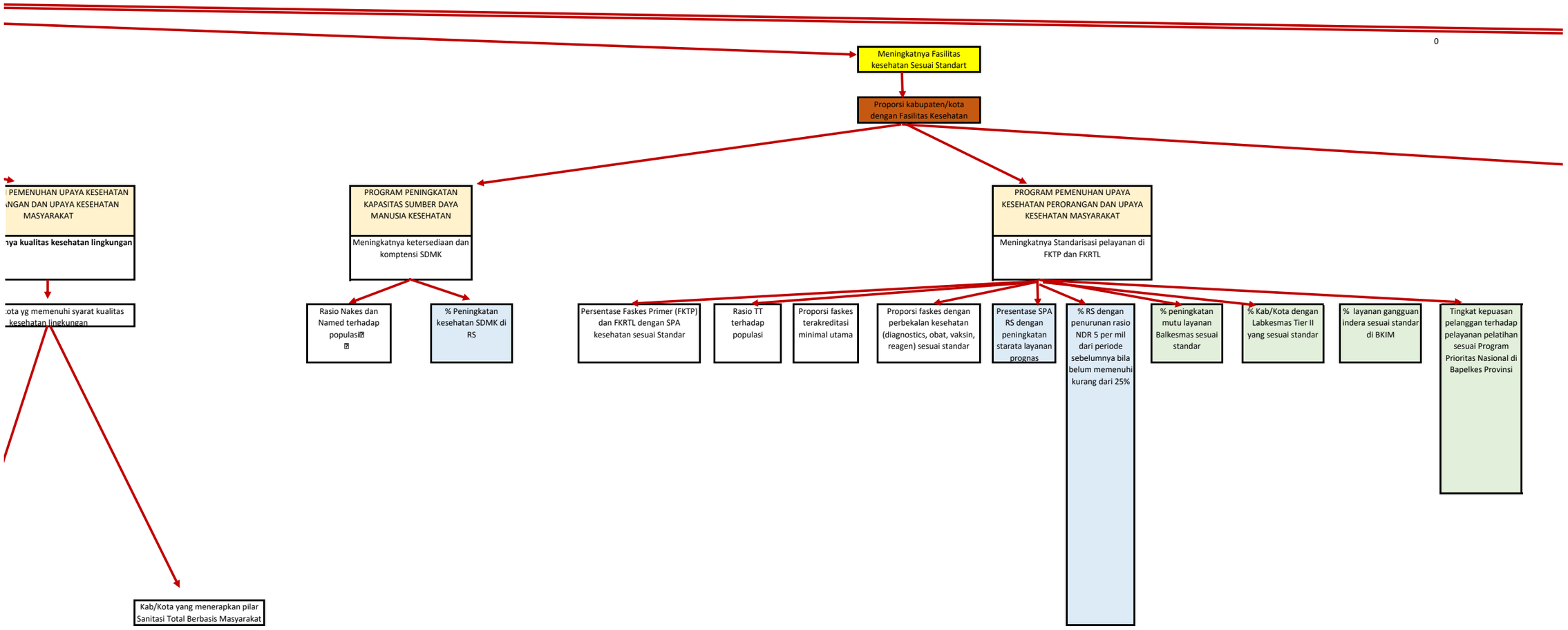
Meningkatnya Fasilitas kesehatan Sesuai Standart
Proporsi kabupaten/kota dengan Fasilitas Kesehatan
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN NGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
nya kualitas kesehatan lingkungan
ota yg memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
Kab/Kota yang menerapkan pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Meningkatnya ketersediaan dan komptensi SDMK
Rasio Nakes dan Named terhadap populasi
% Peningkatan kesehatan SDMK di RS
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Meningkatnya Standarisasi pelayanan di FKTP dan FKRTL
Persentase Faskes Primer (FKTP) dan FKRTL dengan SPA kesehatan sesuai Standar
Rasio TT terhadap populasi
Proporsi faskes terakreditasi minimal utama
Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen) sesuai standar
Presentase SPA RS dengan peningkatan starata layanan prognas
% RS dengan penurunan rasio NDR 5 per mil dari periode sebelumnya bila belum memenuhi kurang dari 25%
% peningkatan mutu layanan Balkesmas sesuai standar
% Kab/Kota dengan Labkesmas Tier II yang sesuai standar
% layanan gangguan indera sesuai standar di BKIM
Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan sesuai Program Prioritas Nasional di Bapelkes Provinsi

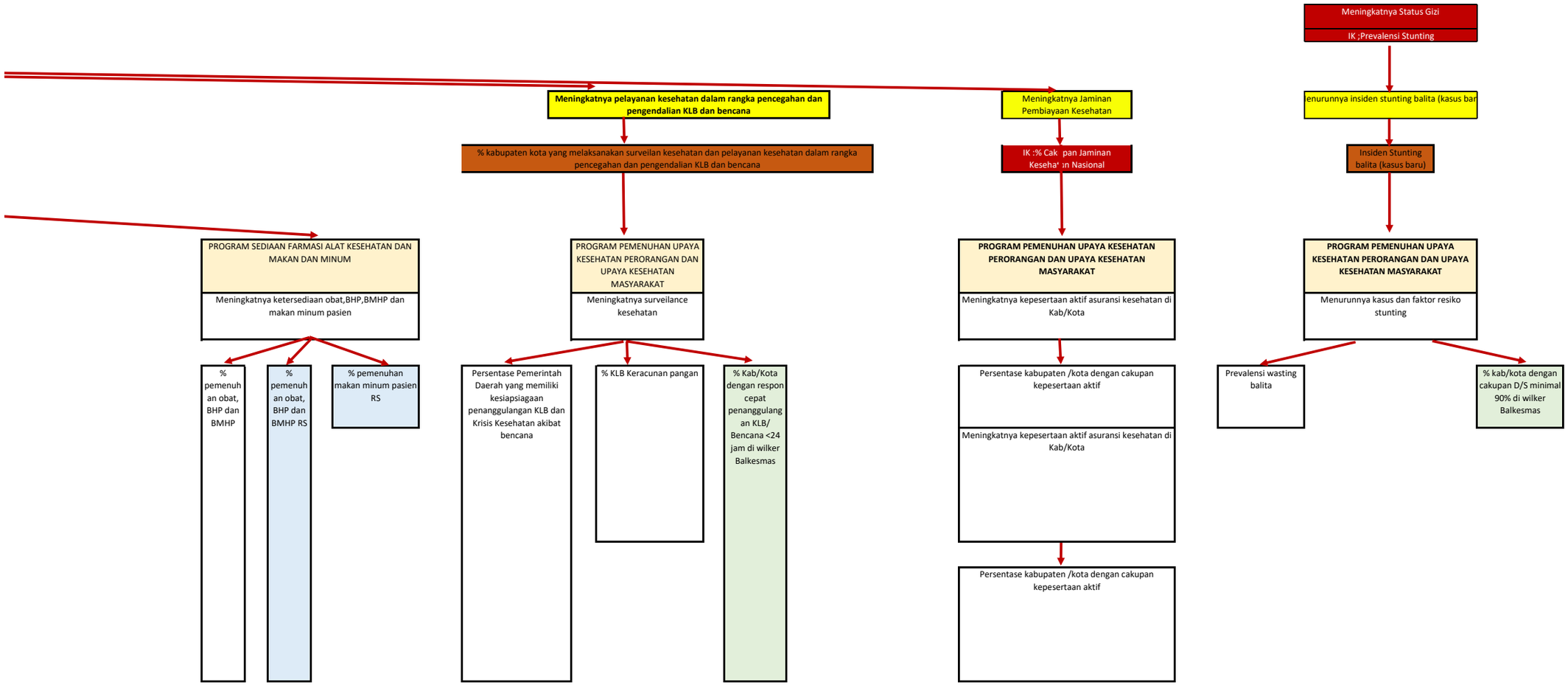
Meningkatnya Status Gizi
IK ;Prevalensi Stunting
enurunnya insiden stunting balita (kasus bar
Insiden Stunting balita (kasus baru)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Menurunnya kasus dan faktor resiko stunting
Prevalensi wasting balita
% kab/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilker Balkesmas
Meningkatnya pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana
% kabupaten kota yang melaksanakan surveilan kesehatan dan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Meningkatnya surveilance kesehatan
Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kesiapsiagaan penanggulangan KLB dan Krisis Kesehatan akibat bencana
% KLB Keracunan pangan
% Kab/Kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/ Bencana <24 jam di wilker Balkesmas
Meningkatnya Jaminan Pembiayaan Kesehatan
IK :% Cak pan Jaminan Kesehat n Nasional
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Meningkatnya kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kab/Kota
Persentase kabupaten /kota dengan cakupan kepesertaan aktif
Meningkatnya kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kab/Kota
Persentase kabupaten /kota dengan cakupan kepesertaan aktif
PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKAN DAN MINUM
Meningkatnya ketersediaan obat,BHP,BMHP dan makan minum pasien
% pemenuhan obat, BHP dan BMHP
% pemenuhan obat, BHP dan BMHP RS
% pemenuhan makan minum pasien RS

NGOPENI.
NGELAKONI.
Jateng

CASCADING RENSTRA

TAHUN 2025-2029

Semarang, 4 September 2025

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

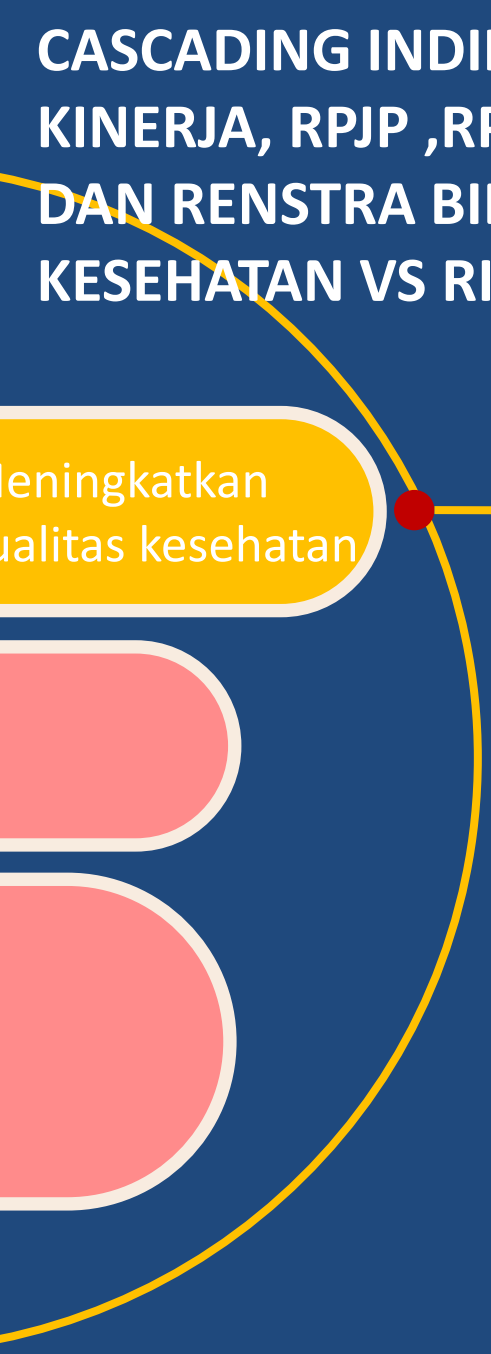

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan
1. Usia Harapan Hidup	1. AKI	1. Persentase Kab/Kota dengan RS mencapai *Case Fatality Rate Direct Obstretic* < 1% (eklampsi dan perdarahan)	1. Persentase Kabupaten/Kota dengan RS PONEK sesuai standar 2. Persentase RS yang melaksanakan AMPSR sesuai standar
		2. Persentase penurunan kasus kematian ibu	1. Persentase ANC 6 Kali (K6) 2. Prevalensi anemi pada remaja putri 3. Prevalensi anemi pada ibu hamil 4. Persentase ibu hamil yang mendapatkan Skrining Pre-eklamsi 5. Persentase Kab/Kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar
		3. Persentase Kab/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilker 4 Balkesmas	1. Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilker 4 Balkesmas
	2. AKABA	1. Angka kematian bayi	1. Angka kematian neonatal 2. Cakupan skrining Bayi Baru Lahir

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

leningkatkan
ualitas kesehatan

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan
1. Usia Harapan Hidup	3.Angka populasi bebas PTM	1. Persentase Hipertensi dalam pengendalian	1. Persentase Kab/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Hipertensi sesuai standar 2. Persentase Kab/Kota yg menyelenggarakan Skrining kolesterol pada 80% Puskesmas 3. Persentase Kab/Kota dengan capaian skrining stroke minimal 30%
		2. Persentase DM terkendali	1. Persentase Kab/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian DM sesuai
		3. Cakupan penerima Pemeriksaan Kes. Gratis (PKG)	1. Persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan aktivitas fisik 2. Persentase depresi yang medapatkan layanan
		4. Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun	1. Persentase kab/kota yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

leningkatkan
ualitas kesehatan

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan
1. Usia Harapan Hidup	3. Angka populasi bebas PTM	5. Persentase Kab/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	1. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja di tempat kerja formal dan di tempat kerja informal. 2. Persentase Kabupaten/Kota Yang menyeleng-garakan pengukuran kebugaran
		6. Persentase Kab/Kota di 4 wilker Balkesmas yang melaksanakan skrining keswa dan PTM priroritas dengan cakupan minimal 50%	1. Persentase Kab/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining keswa dan PTM piroritas minimal 50% di 4 wilker Balkesmas
		7. Persentase lanjut usia yang mandiri	1. Persentase Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

leningkatkan
ualitas kesehatan

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan
1. Usia Harapan Hidup	3. Angka populasi bebas PTM	8. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	1. Persentase Kabupaten/Kota dengan faskes yang menyelenggarakan Skrining Kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)
		9. Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	1. Persentase kabupaten/kota yang memiliki proporsi obesitas <23,4%
		10. Prosentase Kabupaten Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat	1. Persentase Kab Kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif. 2. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kampanye pembudayaan hidup sehat

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Sasaran

4. Angka populasi bebas PM

Indikator Program

1. Insidensi HIV
2. Eliminasi malaria
3. Eliminasi NTDs (Pengendalian kasus Filariasis dan Kusta)
4. Angka kematian Dengue
5. Insidensi Hepatitis B

Indikator Kegiatan

1. % Kab/Kota dengan penemuan kasus baru HIV dengan terapi ARV ≥ 90 %
1. Persentase Kab/Kota mencapai Positivity Rate (PR) malaria < 5%
1. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan TAS Filariasis sesuai dengan target
2. Persentase Kab/Kota dengan RFT (Release From Treatment) > 90%
1. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pencegahan dengue
1. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan screning DDHB pada ibu hamil >80%

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

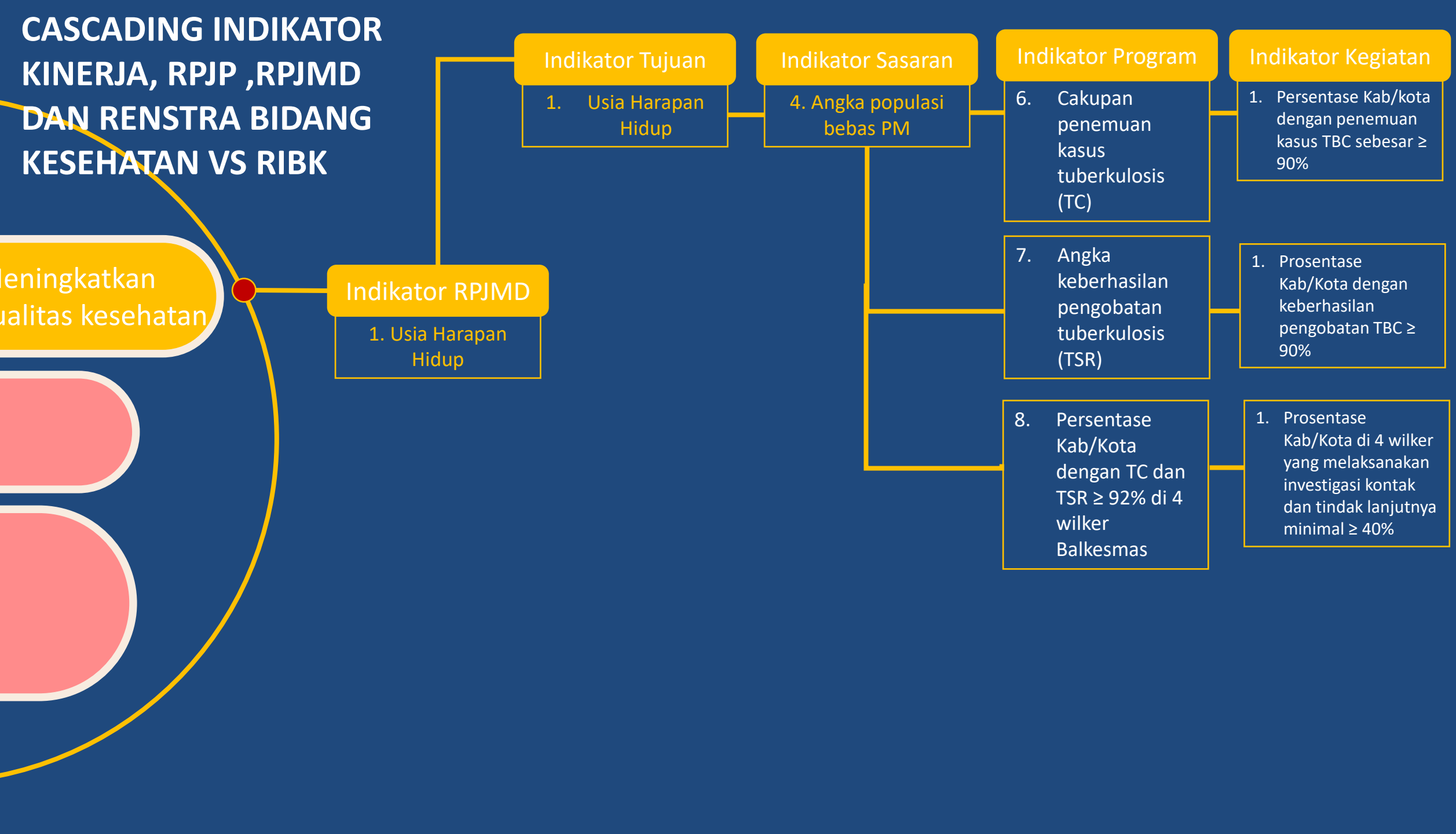

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

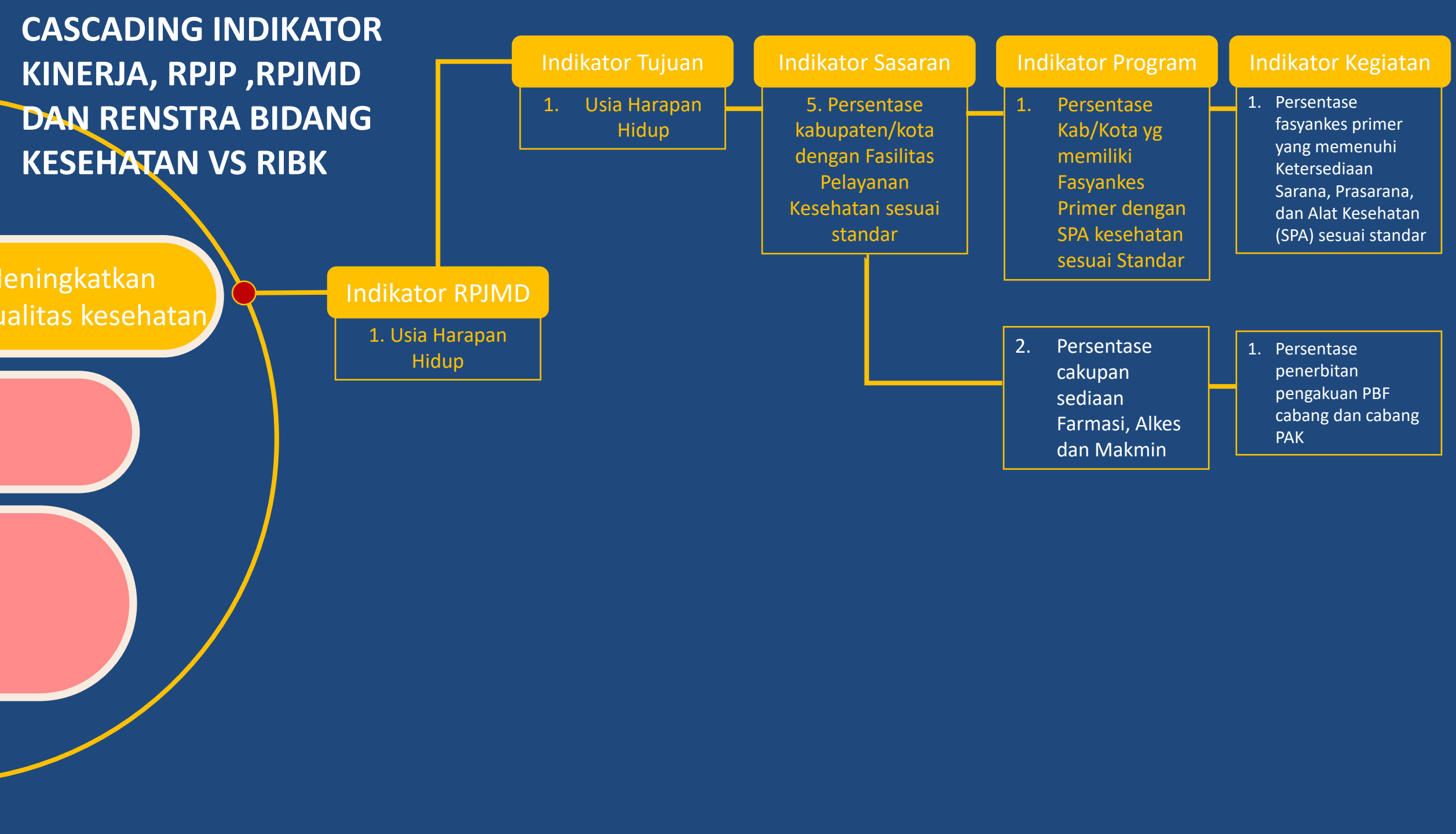

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

eningkatkan
alitas kesehatan

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan
1. Usia Harapan Hidup	5. Persentase kabupaten/kota dengan Fasilitas Kesehatan sesuai standar	3. Persentase Kab/Kota dengan fasyankes primer terakreditasi paripurna	1. Persentase fasyankes primer terakreditasi minimal paripurna 2. Persentase Kab/Kota menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP)
		4. Persentase fasyankesyang terintegrasi dalam SIKN	1. Persentase faskes yang terkoneksi ke SIKN 2. Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN
		5. Persentase Kab/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kes trad sesuai standar mutu	1. Persentase Kabupaten/ Kota dengan tata kelola kesehatan tradisional yang baik

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

leningkatkan
ualitas kesehatan

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Sasaran

5. Persentase kabupaten/kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar

Indikator Program

6. Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar

7. Persentase Peningkatan mutu layanan UPT sesuai Standar di 4 Balkesmas

Indikator Kegiatan

1. Persentase fasyankes primer yang memiliki obat-obatan (termasuk vaksin) sesuai standar
2. Persentase fasyankes lanjutan yang memiliki obat-obatan sesuai standar

1. Persentase pemenuhan obat, BHP, BMHP, dan makmin pasien
2. Persentase pemenuhan sarpras
3. Persentase Pembangunan fasilitas RS
4. Persentase pencapaian indikator mutu dan program tim mutu di 4 Balkesmas

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

eningkatkan
ualitas kesehatan

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan
1. Usia Harapan Hidup	5. Persentase kabupaten/kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	8. Persentase Fasyankes rujukan Tingkat lanjut (FKRTL) dengan SPA Kesehatan sesuai standar	1. Persentase RS Pemda yang memenuhi ketersediaan SPA sesuai standar 2. Persentase Fasyankes rujukan sesuai ketentuan
		9. Persentase Kab/Kota dengan fasyankes lanjutan terakreditasi paripurna	1. Persentase faskes lanjutan dengan akreditasi minimal paripurna
		10. Persentase Kab/Kota dengan labkesmas Tingkat 2 sesuai standar	1. Persentase peningkatan labkesmas Tingkat 2 sesuai standar
		11. Persentase peningkatan mutu layanan Balabkes PAK sesuai standar	1. Persentase pengadaan dan pemeliharaan Alkes/Alat labkes, pengadaan obat, BHP, BMHP, vaksin, makmin, Pembangunan dan pengembangan faskes lainnya di Balabkes PAK

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

leningkatkan
ualitas kesehatan

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Sasaran

5. Persentase kabupaten/kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar

Indikator Program

12. Persentase Kabupaten/Kota yang terlayani pelayanan laboratorium dan kalibrasi di Balabkes PAK
13. Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi
14. Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi named dan nakes yg teregristrasi dan berkualitas

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi di Fasilitas Layanan Kesehatan

1. Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai dengan standart
2. Persentase RS Pemerintah dengan Dr.spesialis sesuai standar
3. Persentase SDMK yang kompeten

1. Persentase pelat dan pengemb-angan kompetensi named dan nakes sesuai program prioritas nasional yang diselengga-rakan Bapelkes
2. Persentase pengawasan ketercapaian standar mutu pelat

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

leningkatkan
ualitas kesehatan

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Program	Indikator Kegiatan
1. Usia Harapan Hidup	6. Persentase kab/kota yang melaksanakan surveilans kesehatan dan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB, bencana dan kesling	1. Persentase Kako mencapai target kekebalan kelompok	1. Cakupan imunisasi lengkap 14 Antigen mencapai target 2. Cakupan imunisasi bayi lengkap
		2. Persentase Kab/Kota dengan pengendalian KLB/wabah dan bencana	1. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan kiris kesehatan akibat bencana
		3. Persentase Kab/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan KLB/wabah serta penanganan bencana < 24 jam di 4 wilker Balkesmas	1. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan yankes (Pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana di 4 wilker Balkesmas

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

leningkatkan
ualitas kesehatan

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Sasaran

6. Persentase kabupaten kota yang melaksanakan surveilan kesehatan dan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB, bencana dan kesling

Indikator Program

4. Presentase Kabupaten/ Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan

Indikator Kegiatan

1. Kabupaten/ Kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%
2. Persentase Kabupaten/ Kota yang puskesmasnya melaksanakan surveilans dan intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit
3. Persentase Jemaah Haji yang dilakukan kegiatan surveilans Kesehatan
4. Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

leningkatkan
ualitas kesehatan

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Sasaran

6. Persentase kabupaten kota yang melaksanakan surveilan kesehatan dan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB, bencana dan kesling

Indikator Program

Persentase Kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan

Indikator Kegiatan

1. Persentase kab/kota sehat
2. Persentase Kab/kota yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara
3. Persentase Kab/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat
4. Persentase Kab/Kota dengan tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat
5. Persentase Kab/Kota dengan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat
6. Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan adaptasi perubahan Iklim Bidang Kesehatan
7. Persentase Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
8. Persentase Kab/Kota dengan fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingnkungan

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

eningkatkan
ualitas kesehatan

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Sasaran

7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional/JKN

Indikator Program

1. Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif

Indikator Kegiatan

1. Persentase kabupaten /kota dengan kenaikan cakupan kepesertaan aktif

Indikator Sasaran

1. NDR RS Moewardi
2. NDR RS Margono
3. NDR RS Adhyatma
4. NDR RS dr.Rehatta
5. NDR RSJ Arief Zainudin
6. NDR RSJ Soejarwadi
7. NDR RSJ Amino
8. NDR RS Mata Soeparjo Rustam

Indikator Program

1. % pemenuhan obat, BHP dan BMHP RS
2. % pemenuhan makan minum pasien RS
3. Presentase SPA RS dengan peningkatan starata layanan prognas
4. % RS dengan penurunan rasio NDR 5 per mil dari periode sebelumnya bila belum memenuhi kurang dari 25%

Indikator Kegiatan

1. % alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan
2. % penyediaan fasilitas pelayanan dan sarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan
3. % penyediaan obat dan BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang
4. % penyediaan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

eningkatkan
ualitas kesehatan

Indikator RPJMD

1. Usia Harapan Hidup

Indikator Tujuan

Usia Harapan Hidup

Indikator Sasaran

1. NDR RS Moewardi
2. NDR RS Margono
3. NDR RS Adhyatma
4. NDR RS dr.Rehatta
5. NDR RSJ Arief Zainudin
6. NDR RSJ Soejarwadi
7. NDR RSJ Amino
8. NDR RS Mata Soeparjo Rustam

Indikator Program

5. % Peningkatan kompetensi kesehatan SDMK di 7 RS
6. % promosi dan pemberdayaan masyarakat di RS

Indikator Kegiatan

1. % indikator mutu pelayanan penunjang medis diagnostik dan terapi yang sesuai standar
2. % indikator mutu pelayanan penunjang sarpras medis dan non medis yang sesuai dengan standar RS
3. % pelaksanaan pendidikan dan penelitian yang terintegrasi dengan pelayanan di Rumah Sakit sesuai target
4. % unit kerja pelayanan keperawatan yang capaian indikator mutunya sesuai target
5. % unit kerja pelayanan medis yang capaian indikator mutunya sesuai target
6. Jumlah Jenis pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi
7. Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS

CASCADING INDIKATOR KINERJA, RPJP ,RPJMD DAN RENSTRA BIDANG KESEHATAN VS RIBK

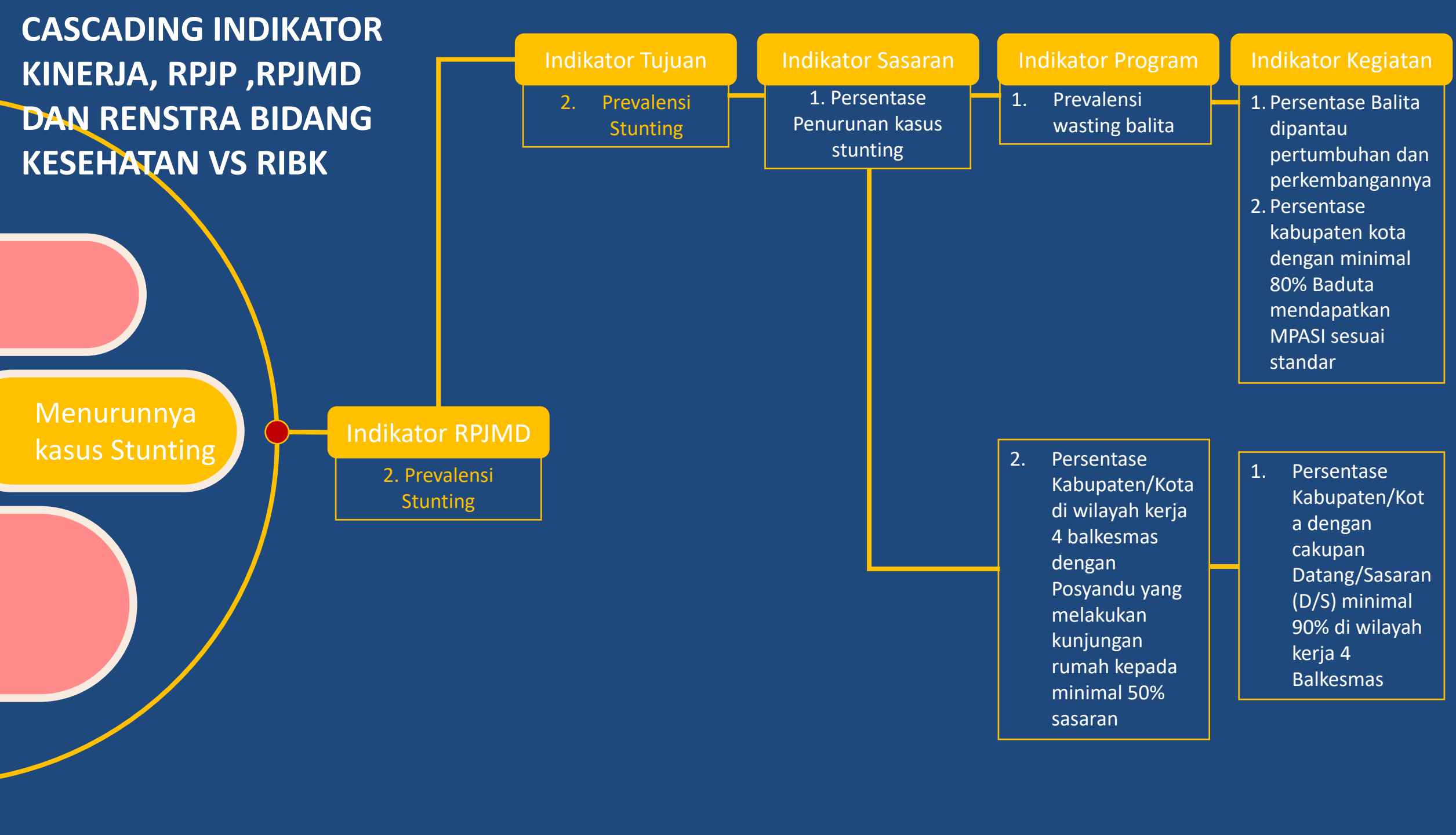

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TERHADAP RISIKO STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAN RS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan								
	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu	Kematian ibu akibat resiko obstetric dan non obstetric	Sangat tinggi	Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Tidak ada peningkatan dalam penurunan kematian ibu	Komitmen penurunan kematian ibu di fasyankes primer dan rujukan sebelum pengajuan perpanjangan ijin operasional	Kepala Bidang Kesmas	2025 - 2029
		Angka kematian balita	Kematian balita akibat penyakit menular dan tidak menular	Tinggi	Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Menurunnya kasus penyakit menular dan tidak menular pada balita	Screening faktor penyakit menular dan tidak menular pada balita dengan tatakelola paripurna	Kepala Bidang Kesmas	2025 - 2029
	Menurunnya penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM)	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	Capaian skrining ptm rendah, meningkatnya angka kesakitan dan kematian PTM	Tinggi	Sosialisasi dan kie belum efektif	Meningkatnya angka kesakitan dan kematian PTM	Melaksanakan perencanaan dan evaluasi secara rutin	Kepala Bidang P2P	2025 - 2029
		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	Resiko tinggi penyakit menular dan Daerah endemis	Sangat tinggi	Keterlambatan diteksi dini dan tatalaksana kasus	Meningkatnya kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit menular	Perencanaan dan evaluasi, kordinasi, validasi data	Kepala Bidang P2P	2025 - 2029

No	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Tidak ada komitmen pimpinan faskes dalam pemenuhan standar Fasilitas kesehatan	Tinggi	Perubahan regulasi terkait dengan standarisasi pelayanan kesehatan	Angka kesakitan dan morbiditas meningkat	Melakukan verifikasi dan validasi usulan sdm dan spa sesuai standar	Kepala Bidang Yankes	2025 - 2029
	Terkendalinya penyakit akibat kejadian luar biasa (KLB) dan bencana	Persentase Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian KLB, Bencana, dan Kesehatan Lingkungan	Keterlambatan respon kab/kota dalam klb/bencana	Sangat tinggi	Peningkatan dan penyebaran wilayah kasus penyakit potensi klb dan krisis kesehatan pada situasi bencana	Peningkatan klb, dan kematian	Integrasi penyilidikan epidemologi untuk klb, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana	Kepala Bidang P2P	2025 - 2029
	Meningkatnya jaminan pembiayaan kesehatan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Adanya kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pendataan penerima manfaat	Sangat tinggi	Masih ada penerima PBI belum tepat sasaran	Belum semua sasaran mendapatkan PBI	Kordinasi pelaksanaan kebijakan pada lintas OPD dan pemerintah pusat	Kepala Bidang Yankes	2025 – 2029
2	Menurunnya kasus stunting	Persentase Penurunan Kasus Stunting	Kebutuhan gizi seimbang keluarga tidak terpenuhi	Sangat tinggi	Kurangnya pemenuhan gizi seimbang di keluarga	Kasus stunting meningkat	Penguatan pelayanan kesehatan dasar pada sasaran ibu hamil, bayi, balita, usia sekolah remaja dan calon pengantin	Kepala Bidang Kesmas	2025 - 2029

No	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
RSUD Dr. Moewardi									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD Dr.Moewardi	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSUD Dr.Moewardi	Kasus medis yang dilayani tergolong kompleks dan rumit	16	RSUD Dr. Moewardi merupakan RS kelas A yang merupakan rujukan terakhir	Target nett death rate (angka kematian bersih) tidak tercapai.	Usulan peninjauan ulang indikator Standar Pelayanan Minimal khususnya target NDR di rumah sakit kelas A (rujukan tersier)	Direktur	2029
2.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indek Kepuasan Masyarakat RSUD Dr.Moewardi	Pelayanan tidak sesuai standar	12	Sumber daya pelayanan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang terbatas	Komplain pengguna layanan meningkat	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan sesuai standar	Direktur	2030
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko RSUD Dr.Moewardi	Terdapat risiko potensial yang tidak teridentifikasi	16	Pengelolaan risiko RS rendah	Kinerja RS rendah	peningkatan kompetensi tim manajemen risiko RS	Direktur	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
RSUD Prof Dr Margono Soekarjo									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Kasus medis yang dilayani tergolong Kompleks dan banyaknya rujukan pasien yang sudah kritis	16	RSUD Prof Dr Margono Soekarjo merupakan RS Pemerintah kelas A yang merupakan rujukan terakhir wilayah Jawa Bagian Barat Selatan	target nett death rate (angka kematian bersih) tidak tercapai	usulan peninjauan ulang indikator Standar Pelayanan Minimal khususnya target NDR di rumah sakit kelas A (rujukan tersier)	Direktur	2030
2.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indek Kepuasan Masyarakat RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Pelayanan tidak sesuai standar	16	Sumber daya pelayanan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang terbatas	Potensi complain pengguna layanan meningkat	1. Peningkatan kompetensi SDMK 2. Pemenuhan sarana prasarana yang sesuai standar;	Direktur	2030
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Tidak tercapainya standar indeks reformasi birokrasi perangkat daerah sesuai target	16	Nilai Reformasi Birokrasi Organisasi perangkat daerah tidak tercapai	SPIP tidak terpenuhi	Meningkatkan komitmen Pimpinan dengan melakukan penguatan pengawasan anggaran	Direktur	2030

No	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
RSUD dr. Adhyatma, MPH									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSUD dr. Adhyatma, MPH	Pasien masuk ke RSUD dr. Adhyatma, MPH dengan tingkat keparahan berat	16	Kebijakan Sistem rujuk berjenjang BPJS pemerintah kabupaten	1. Angka kematian IGD < 24 jam tinggi 2. Angka kematian < 48 jam setelah rawat inap tinggi	1. Peningkatan kompetensi SDMK 2. Pemenuhan sarana prasarana yang sesuai standar secara bertahap dan sesuai prioritas dengan pemerintah kabupaten dan BPJS	Direktur	2030
2.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indek Kepuasan Masyarakat RSUD dr. Adhyatma, MPH	Waktu tunggu pelayanan pasien panjang	16	Pelayanan pasien belum sesuai dengan standar respontime di SPO	Reputasi RS menjadi jelek	Evaluasi dan sosialisasi terkait SPO respontime pelayanan Peningkatan kompetensi SDMK Pemenuhan sarana prasarana yang sesuai standar	Direktur	2030
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko RSUD dr. Adhyatma, MPH	Budaya pengelolaan risiko tinggi	16	Belum optimalnya pengelolaan RS berbasis manajemen risiko	Tujuan Rumah Sakit tidak tercapai	1. Melakukan sosialisasi pengelolaan risiko kepada semua staf di RSUD dr. Adhyatma, MPH 2. Menerapkan budaya pengelolaan risiko diseluruh unit rumah sakit 3. Monev pengelolaan risiko setiap triwulan	Direktur	2030

No	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
RSUD dr. Rehatta									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD dr. Rehatta	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSUD dr. Rehatta	Kompleksitas dan keparahan kasus pasien yang dilayani	16	1. Kesulitan akses geografis 2. Kebijakan rujukan berjenjang BPJS dan Kebijakan birokrasi pemerintah kabupaten	Peningkatan Dead On Arrival (DOA) di IGD dan Kematian ≥48 jam di Rawat inap	1. Pengembangan kompetensi SDM Kesehatan 2. Pemenuhan sarana prasarana 3. Advokasi dan Kolaborasi dengan Pemerintah kabupaten dan BPJS	Direktur	2030
2.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD dr. Rehatta	Memanjangnya waktu tunggu di pelayanan	16	1. Kurangnya ketersediaan dokter spesialis 2. Sarana Prasarana kurang memadai	1. Penurunan kunjungan 2. Penurunan pendapatan	1. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut alur pelayanan 2. Melakukan evaluasi kinerja staf 3. Perbaikan dan pemenuhan sarana prasarana sesuaiprioritas dan bertahap 4. Pengusulan formasi ASN dokter spesialis	Direktur	2030
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko RSUD dr. Rehatta	Budaya pengelolaan risiko tinggi	16	Belum optimalnya pengelolaan RS berbasis manajemen risiko	Tujuan Rumah Sakit tidak tercapai	1. Melakukan sosialisasi pengelolaan risiko kepada semua staf di RSUD dr. Rehatta 2. Menerapkan budaya pengelolaan risiko diseluruh unit rumah sakit 3. Monev pengelolaan risiko setiap 4. Triwulan	Direktur	2030

No	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
RSJD Dr. Amino Gondohutomo									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Kemampuan rumah sakit dalam mencapai target NDR yang semakin menurun setiap tahunnya	16	Kondisi pasien saat masuk ke RSJD Dr. Amino Gondohutomo sudah membutuhkan penanganan intensif	Angka kematian <48 jam setelah rawat inap tinggi	1. Monitoring berkala penerapan standar akreditasi rumah sakit 2. Monitoring capaian SPM rumah sakit	Direktur	2030
2.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Kepuasan Masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Sistem pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi pengunjung/ pasien	16	1. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada pengunjung 2. Sarana prasarana kurang memadai	Ketidakpuasan pengunjung/pasien terhadap layanan yang telah diterima	1. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat 2. Perbaikan dan pemenuhan sarana prasarana sesuai prioritas dan bertahap 3. Peningkatan kompetensi SDMK	Direktur	2030
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Penerapan budaya pengelolaan risiko yang belum maksimal	16	Tingkat pengelolaan risiko oleh pemilik risiko masih kurang memadai.	Keterlambatan Penanganan Masalah atau Menanggulangi Risiko	1. Menyelenggarakan sosialisasi mengenai pengelolaan risiko kepada seluruh pegawai 2. Menerapkan budaya pengelolaan risiko di setiap unit RS. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan risiko setiap semester	Direktur	2030

No	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
RSJD Dr. Arif Zainudin									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSJD Dr. Arif Zainudin	NDR pada RSJD Dr. Arif Zainudin sangat tinggi	16	1. Keterbatasan sarana dan prasarana; 2. Kondisi pasien saat dirujuk sudah memburuk, 3. Penanganan pasien kurang maksimal	1. Kredibilitas Rumah Sakit rendah 2. Kepercayaan masyarakat menurun	1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; 2. Peningkatan kualitas perawatan dan pelayanan klinis; 3. Peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenga kesehatan pendukung lainnya	Direktur	2030
2.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis/Meningkat nya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Kepuasan Masyarakat RSJD Dr. Arif Zainudin	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap RSJD Dr. Arif Zainudin rendah	16	Kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit tidak sesuai harapan masyarakat	1. Kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit menurun; 2. Masyarakat yang mempercayakan pengobatan di rumah sakit RSJD Dr. Arif Zainudin berkurang; 3. Kredibilitas rumah sakit menurun; 4. Pendapatan rumah sakit berkurang	Memperkecil kesenjangan antara harapan dan kenyataan melalui : 1. Peningkatan sarana dan prasarana; 2. Efisiensi dan kenyamanan dalam pelayanan; 3. Peningkatan kualitas perawatan dan pelayanan klinis; 4. Peningkatan pola komunikasi dan hubungan pasien dengan petugas; 5. Transparansi dan kejelasan biaya dan penagihan	Direktur	2030

No	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah RSJD Dr. Arif Zainudin	Pengelolaan Manajemen Risiko di RSJD Dr. Arif Zainudin tidak berjalan sesuai ketentuan	16	1. Pengetahuan tentang manajemen risiko rendah 2. Tidak ada komitmen pimpinan	Banyak kasus yang muncul dan merugikan institusi rumah sakit	1. Peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan manrisk; 2. Membuat komitmen bersama; 3. Menetapkan tim pengelola manrisk; 4. Melakukan monev secara berkala	Direktur	2030
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Rendahnya mutu pelayanan sehingga dapat memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan risiko kematian	15	Tidak semua standar pelayanan dilaksanakan dengan benar dan konsisten	Meningkatnya risiko kematian	1. Monitoring berkala penerapan standar akreditasi Rumah Sakit 2. Monitoring capaian SPM rumah sakit	Direktur	2030
2.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis/Meningkat nya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Kepuasan Masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Sistem pelayanan tidak efektif dan efisien	15	Sistem pelayanan kurang efektif dan sarpras belum memenuhi standar	Komplain/ ketidakpuasan pasien	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem layanan dan sarpras rumah sakit	Direktur	2030

No	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
3.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis/Meningkat nya kualitas indeks pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Proses manajemen risiko tidak mencakup semua proses bisnis rumah sakit	12	Belum terpadunya manajemen resiko dengan proses bisnis rumah sakit	Mitigasi risiko tidak berkontribusi maksimal terhadap core bisnis rumah sakit	Monitoring pengelolaan manajemen risiko sampai unit kerja terkecil	Direktur	2030
RSMD Soepardjo Roestam									
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan/Meningk atnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSMD Soepardjo Roestam	Usia Harapan Hidup (UHH)/NDR (Net Death Rate) RSMD Soepardjo Roestam	Rendahnya mutu pelayanan sehingga dapat memperburu k kondisi pasien dan meningkatkan risiko kematian	15	Tidak semua standar pelayanan dilaksanakan dengan benar dan konsisten	Meningkatnya risiko kematian	1. Monitoring berkala penerapan standar akreditasi rumah sakit 2. Monitoring capaian SPM rumah sakit	Direktur	2030
2.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis/Meningkat nya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indek Kepuasan Masyarakat RSMD Soepardjo Roestam	Pelayanan tidak sesuai standar	16	Sumber daya pelayanan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang terbatas	Komplain pengguna layanan berpotensi meningkat	1. Pemenuhan jumlah SDM 2. Peningkatan kompetensi SDMK 3. Pemenuhan sarana prasarana yang sesuai standar	Direktur	2030

No	Tujuan/Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis/Meningkatn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Indeks Manajemen Risiko RSMD Soepardjo Roestam	Terdapat risiko potensial yang tidak teridentifikasi	16	Pengelolaan risiko RS rendah	Kinerja RS rendah	peningkatan kompetensi tim manajemen risiko RS	Direktur	2030

DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa untuk mencapai tujuan negara secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Keterpaduan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah (Renstra Dinas PUPR), merupakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan kepala daerah, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJMD.

Renstra Dinas PUPR memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Renstra berperan dalam mengarahkan kinerja organisasi agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan kepala daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RENJA) perangkat daerah, sehingga program kegiatan tahunan yang direncanakan lebih terarah dan konsisten, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan. Dengan adanya Renstra mampu mendorong akuntabilitas, efektifitas dan efisien kinerja Dinas PUPR dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025–2029. Tahapan penyusunan Renstra PD meliputi tahapan persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan awal Renstra PD, Penyampaian Ranwal RPJMD kepada PD, Penyampaian Rancangan Renstra PD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas PD, verifikasi rancangan Renstra PD, perumusan rancangan akhir, Reviu APIP, verifikasi rancangan akhir

Renstra PD, hingga penetapan Perkada Renstra PD.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra

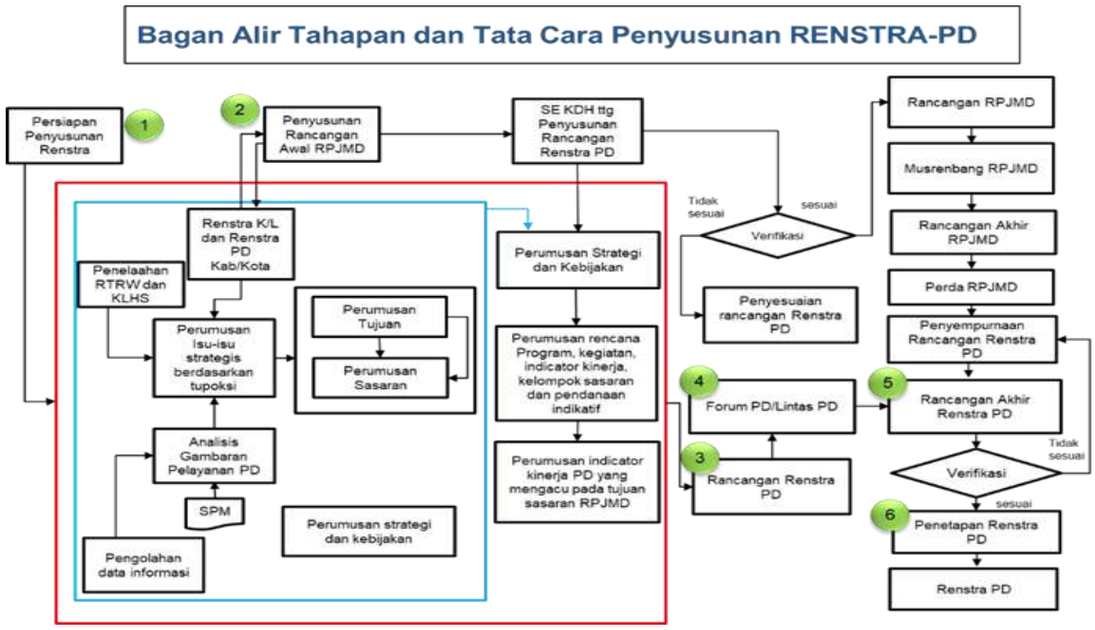

RPJMD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2025-2026 merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional, RPJMD yang disusun digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra PD. Renstra PD secara hierarki berkedudukan dibawah RPJMD, dengan kata lain Renstra PD merupakan terjemahan RPJMD ke dalam perencanaan perangkat daerah, sehingga rencana kegiatan PD yang disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan bertujuan dalam rangka untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dimaksud dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

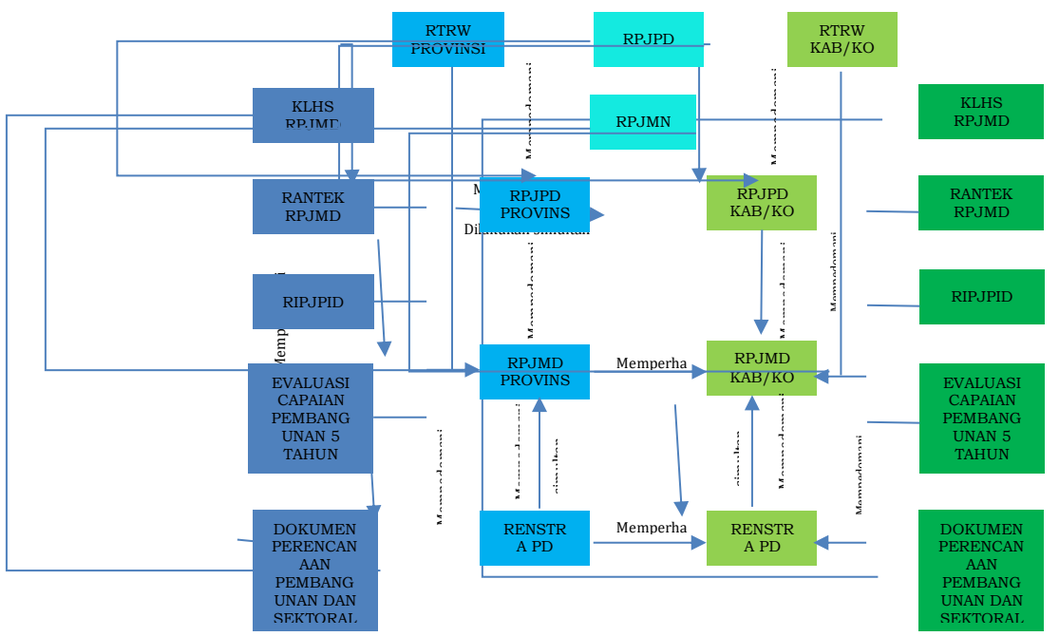

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilakukan penataan organisasi perangkat daerah melalui penggabungan Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah .

Penggabungan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menyinergikan fungsi dan kewenangan yang selama ini berjalan terpisah, namun memiliki keterkaitan erat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah. Dengan bergabungnya kedua dinas, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terpadu, terarah, dan berkesinambungan.

Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan Renstra Tahun 2025 - 2029 secara bertahap dan berkesinambungan dengan melakukan berbagai program dan kegiatan untuk memelihara dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan, meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi, persampahan, bangunan gedung, sumber daya air, penataan ruang, dan meningkatkan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi, serta meningkatkan pengawasan dan pelayanan informasi konstruksi .

Sebagai upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dituangkan melalui Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Penataan Bangunan Gedung, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjabarkan program dan kegiatan tersebut ke dalam Renstra Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah:

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang – Undang RI No 2 tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ;
3. Undang – Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan;

5. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor I90);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
10. Peraturan Pemerintah Nomer 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnsi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri PAN dan RB PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pentunjuk Penyusunan IKU;

24. Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
32. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (tgl 5 Oktober 2020);
33. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah;
34. Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 2 tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025–2029;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024, yaitu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
45. Keputusan Gubernur Nomor 622/31 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa tengah No. 622/2 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah;
46. Keputusan Gubernur Nomor 622/32 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa tengah No 622/11tahun 2022 tentang penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan kolektor primer 2 dan jalan kolektor primer 3 sebagai jalan provinsi di Jawa Tengah;
47. Surat Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 0007/0001565 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan pasca dilaksanakannya Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
48. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.2/0002764 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 Dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk memberikan arah strategis dan menjadi pedoman perangkat daerah dalam periode lima tahun ke depan dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Renstra Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah :

a. Menjadi pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, Dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dalam Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas, fungsi dan struktur) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023. Menguraikan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, serta Penentuan isu-isu strategis pada Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 yang didasarkan pada RPJMD tahun 2025-2029. Menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai tujuan sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatifnya. Target keberhasilan pencapaian tujuan sasaran Renstra melalui indikator kinerja utama (IKU). Penentuan program dan kegiatan harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

2.1.2. Tugas Pokok :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

2.1.3. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan Bidang Bina Teknik, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Irigasi dan Air Baku, Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai, dan Bidang Penataan Ruang.;

b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Bina Teknik, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Irigasi dan Air Baku, Bidang Sungai, Bendungan Dan Pantai, Dan Bidang Penataan Ruang;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Teknik, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Irigasi Dan Air Baku, Bidang Sungai, Bendungan Dan Pantai, dan Bidang Penataan Ruang;

d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas, dan ;

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

2.1.4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Bina Teknik;
d. Bidang Bina Marga;
e. Bidang Cipta Karya;
f. Bidang Irigasi dan Air Baku;
g. Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai;
h. Bidang Penataan Ruang;
i. Balai Pengelola Jalan Wilayah Semarang;
j. Balai Pengelola Jalan Wilayah Pati;
k. Balai Pengelola Jalan Wilayah Purwodadi;
l. Balai Pengelola Jalan Wilayah Surakarta;
m. Balai Pengelola Jalan Wilayah Magelang;
n. Balai Pengelola Jalan Wilayah Wonosobo;
o. Balai Pengelola Jalan Wilayah Cilacap;
p. Balai Pengelola Jalan Wilayah Tegal;
q. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal;
r. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jratun Seluna;
s. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo;
t. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Bogowonto;
u. Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat;
v. Balai Jasa Konstruksi;
w. Kelompok Jabatan Fungsional.

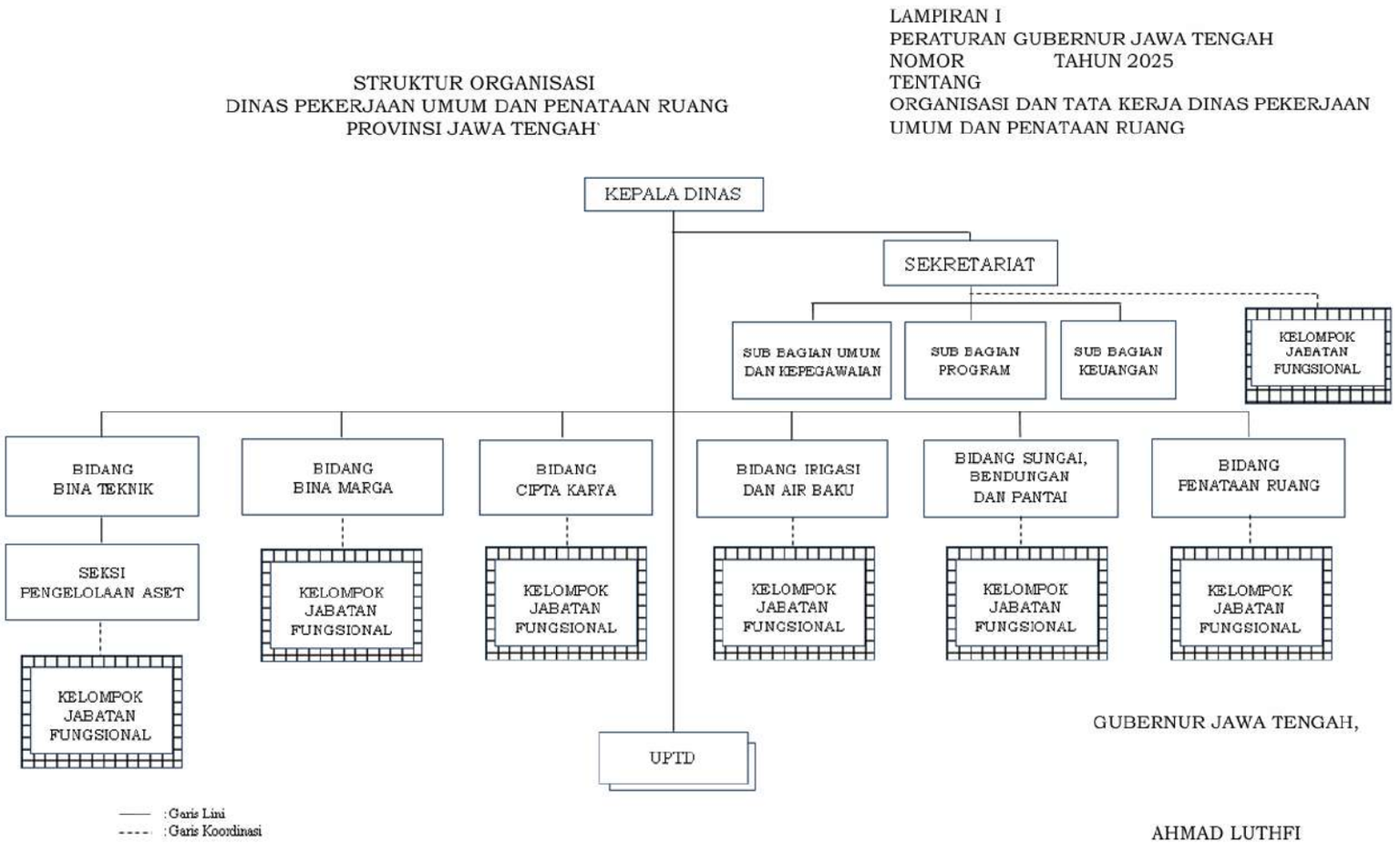

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

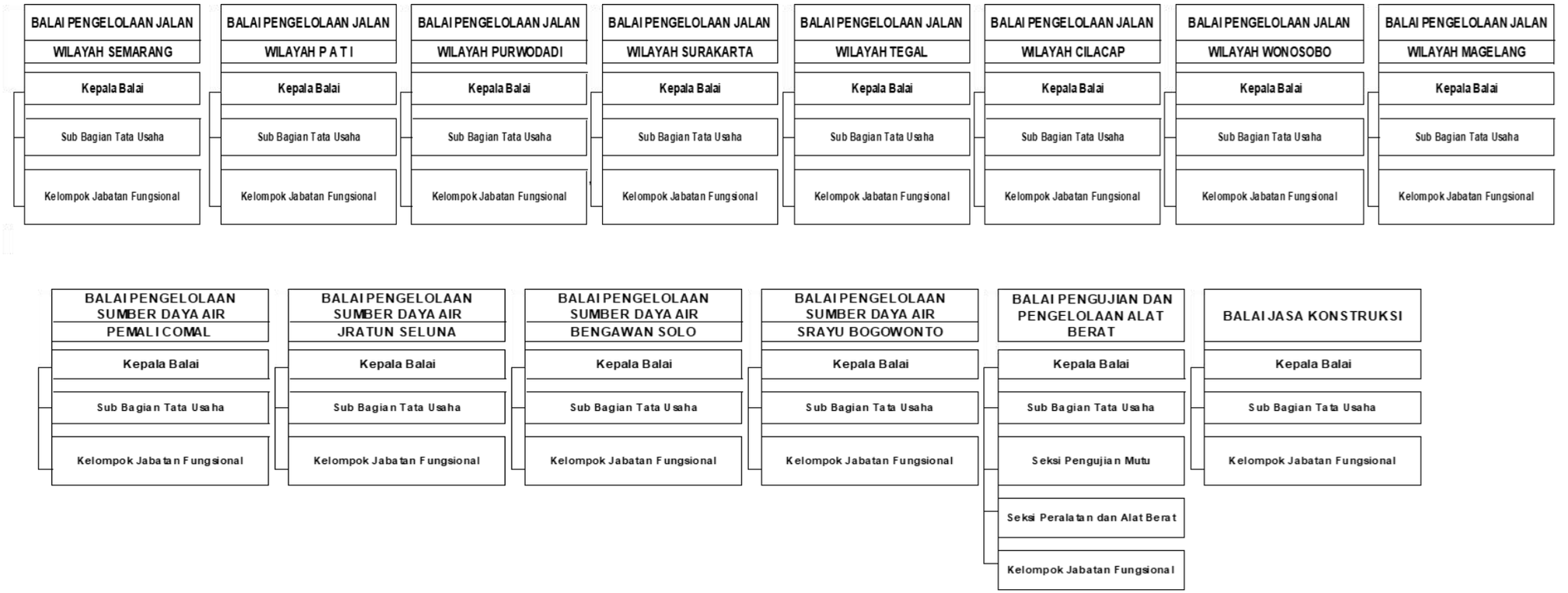

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Balai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Sumber daya Dinas PUPR merupakan penggabungan/ merger dari sumber daya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang serta balai-balai yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah, sumber daya tersebut terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Pada periode 10 September tahun 2025 jumlah keseluruhan pegawai Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah yang merupakan total pegawai penggabungan dua Dinas Ke Pu-an sebanyak 968 aparatur yang berstatus PNS maupun P3K. Berdasarkan jenis kelamin, dari total aparatur yang ada terdiri dari laki-laki sebanyak 731 orang atau 75,52% dan perempuan sebanyak 237 orang tau 24,48%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Jenis Kelamin

DINAS/ JENIS ASN	Laki-laki	Perempuan	Total
DPUBMCK	335	134	469
DPUSDATARU	396	103	499
Total SDM DPUPR	731	237	968

Sumber: Profil ASN Dinas PUBMCK dan Dinas PUSDATARU periode 10 September 2025, bkd.jatengprov.go.id

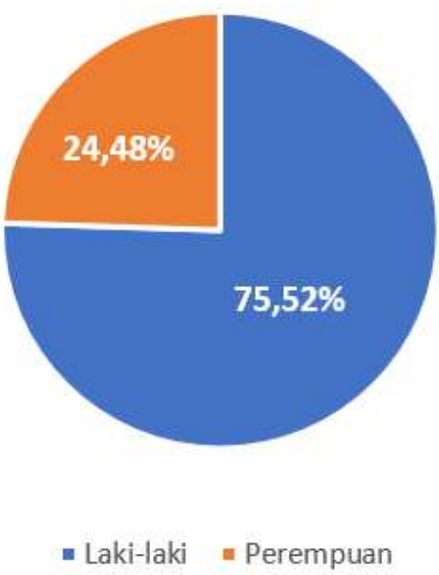

Gambar 2.3 Persentase Pegawai Berdasar Jenis Kelamin

Sumber: Analisa Data

Bila dilihat berdasar tingkat pendidikan Dinas PUPR memiliki SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan yang beragam, persentase perbandingan latar pendidikan yaitu SD-SMA 39,35%, D1-D3 9,60%, D4-S1 41,94%, S2 8,78% dan S3 0,30%. Untuk lebih rinci, ragam Pendidikan dari SDM Dinas PUPR dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

DINAS/ JENIS ASN	SD-SMA	D1-D3	D4-S1	S2	S3	Total
DPUBMCK	141	56	223	46	3	**469**
DPUSDATARU	240	37	183	39	0	**499**
Total SDM DPUPR	**381**	**93**	**406**	**85**	**3**	**968**

Sumber: Profil ASN Dinas PUBMCK dan Dinas PUSDATARU periode 10 September 2025, bkd.jatengprov.go.id

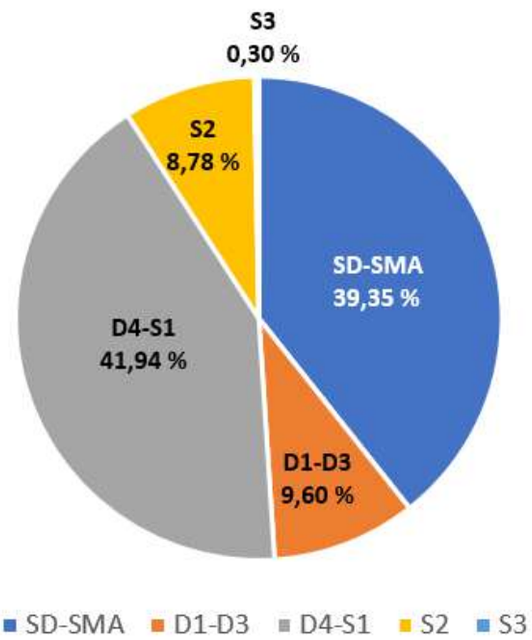

Gambar 2.1 Persentase Pegawai Berdasar Pendidikan

Sumber: Analisa Data

Keberadaan SDM yang memiliki tingkat Pendidikan di atas SLTA Sebesar 60,64%, artinya SDM Dinas PUPR memiliki SDM berkompeten di atas 50%. Dengan demikian diharapkan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah dapat menjalankan tupoksi secara optimal dengan dukungan alat kerja yang memadai. Dengan meningkatkan profesionalisme SDM yang ada dapat mendukung penuh capaian Reformasi Birokrasi dan Kepuasan Masyarakat Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian dilihat persentase pegawai berdasarkan golongan di Dinas PUPR Karya Provinsi Jawa tengah, golongan III mendominasi jumlah terbanyak yaitu sebanyak 629 orang dan golongan II sebanyak 277 Orang serta golongan IV sebanyak 59 Orang, sebagaimana tampak pada grafik berikut :

Tabel 2.3. SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan

DINAS	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Total
DPUBMCK	0	105	328	36	**469**
DPUSDATARU	3	172	301	23	**499**
TOTAL	**3**	**277**	**629**	**59**	**968**

Sumber: Profil ASN Dinas PUBMCK dan Dinas PUSDATARU periode 10 September 2025, bkd.jatengprov.go.id

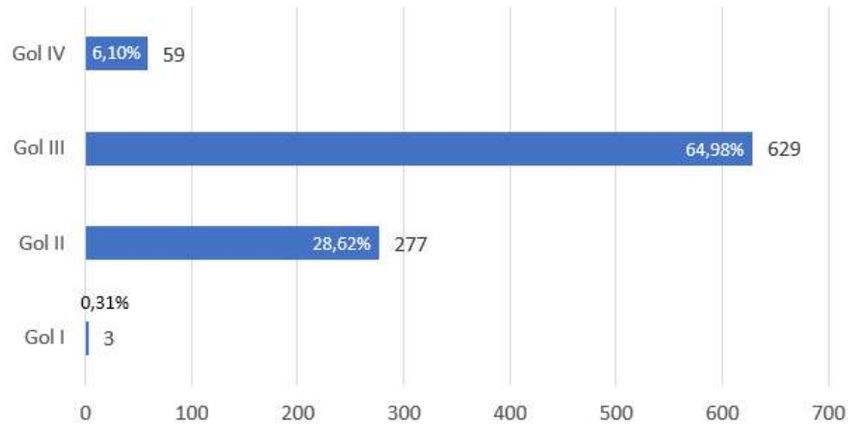

Gambar 2.3 Persentase Pegawai Berdasar Golongan

Sumber: Sumber: Analisa Data

2.2.2 Asset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja. Sarana dan prasarana tersebut terdiri atas aset peralatan dan gedung/bangunan kantor, yaitu:

a. Aset Peralatan Utama

Tabel 2.4. Aset Peralatan Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN
Tanah	8.014	Bidang
Alat Besar	679	Unit
Alat Angkutan	527	Unit
Alat Bengkel dan Alat Ukur	261	Unit

NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN
Alat Pertanian	8	Unit
Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.751	Unit
Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	424	Unit
Alat Kerdokteran dan Alat Kesehatan	6	Unit
Alat Laboratorium	1.088	Unit
Alat Persenjataan	7	Unit
Alat Komputer	1.725	Unit
Alat Keselamatan Kerja	9	Unit
Peralatan Olah Raga	1	Unit
Bangunan Gedung	236	Unit
Monumen	3	Unit
Bangunan Menara	4	Unit
Tugu Titik Kontrol/Pasti	2	Unit
Jalan dan Jembatan	1.973	Unit
Bangunan Air	3.547	Unit
Instalasi	17	Unit
Jaringan	4	Unit
Bahan Perpustakaan	3.149	Unit
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	13	Unit
Konstruksi Dalam Pengerjaan	40	Unit
Hewan	0	Unit
Biota Perairan	0	Unit
Tanaman	0	Unit
Barang Koleksi Non Budaya	0	Unit
Aset Tetap Dalam Renovasi	5	Unit
Konstruksi Dalam Pengerjaan	57	Unit
Total	27.550	Unit

b. Aset Gedung dan Bangunan Kantor

Tabel 2.5. Aset Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

NO	Kantor	Gedung Kantor		Rumah negara		Gudang		Tempat Ibadah		Pos jaga		Garasi		Tempat Pertemuan		Olahraga		Pagar		Mess		Tugu		Hanggar Bengkel		Kantin		Pos Curah Hujan	
		Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Dinas PU BMCK Provinsi Jawa Tengah	6	4713	5	350	0	0	1	9273	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah)	1	1.596	0	0	2	700	1	370			0	0					2	500	2	460			1	900	1	200	0	0
3	BPJ Wil Tegal	10	1022	9	1712	1	80	0	0	0	0	1	200	1	200	1	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BPJ Wil Pekalongan	13	2769	1	53	1	205	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	1	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BPJ Wil Cilacap	7	13609	2	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Kantor	Gedung Kantor		Rumah negara		Gudang		Tempat Ibadah		Pos jaga		Garasi		Tempat Pertemuan		Olahraga		Pagar		Mess		Tugu		Hanggar Bengkel		Kantin		Pos Curah Hujan	
		Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6	BPJ Wil Semarang	7	1246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BPJ Wil Magelang	10	2306	5	391	5	619	1	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BPJ Wil Wonosobo	5	1081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	1	80	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BPJ Wil Pati	12	1600	1	251	1	98	2	94	1	9	1	108	0	0	0	0	0	0	0	0	1	242	0	0	0	0	0	0
10	BPJ Wil Purwodadi	12	2047	7	759	1	48	2	64	0	0	2	414	3	416	1	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	BPJ Wil Surakarta	12	1606	2	126	0	0	0	0	0	0	0	0	1	242	0	0	0	0	0	0	1	532	0	0	0	0	0	0
12	Balai PSDA Pemali Comal	6	1.839	1	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	250
13	Balai PSDA Bodri Kuto	10	2.957	3	251	2	475	1	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	110

NO	Kantor	Gedung Kantor		Rumah negara		Gudang		Tempat Ibadah		Pos jaga		Garasi		Tempat Pertemuan		Olahraga		Pagar		Mess		Tugu		Hanggar Bengkel		Kantin		Pos Curah Hujan	
		Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)	Jml	Luas (m²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14	Balai PSDA Serang Lusi Juana	2	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200	0	0	0	0
15	Balai PSDA Bengawan Solo	6	1.183	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150	0	0	0	0	0	0	1	750	0	0	0	0	0	0	1	144
16	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	6	2.169	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	70
17	Balai PSDA Serayu Citanduy	3	1700	5	640	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	1	172	0	0	1	210	0	0	6	120
18	Balai Pengujian dan Peralatan	2	400	0	0	0	0	0	0	0	0	1	297	0	0	0	0	1	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Balai Jasa Konstruksi	1	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Selama periode tahun 2018-2023, Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah telah mencapai target-target pembangunan di urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Jawa Tengah.

Adapun pada periode tersebut untuk bidang Kebinamargaan dan Keciptakaryaan berdasarkan tupoksinya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk bidang sumber daya air dan penataan ruang menjadi tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

2.3.1. Gambaran Pelayanan Bina Marga

Lingkup pelayanan Bina Marga adalah penyelenggaraan jalan dan jembatan yang menjadi wewenang Provinsi Jawa Tengah, serta pelengkap jalan seperti saluran drainase, dinding penahan tanah, dan bahu jalan. Total panjang jalan di Jawa Tengah sebesar 32.208,86 km yang terbagi sesuai kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan Nasional sepanjang 1.887,29 Km sebesar 5,86 % (SK Menteri PUPR No. 1668/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional tanggal 2 Desember 2022).
2. Kewenangan Provinsi sepanjang 2440,12 sebesar 7,58% (Keputusan Gubernur Nomor 622/31 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa tengah No. 622/2 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah);
3. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 27.881,45 sebesar 86,56 %.

Kondisi jalan kewenangan provinsi tahun 2024 yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 1149,053 km atau 47,09 persen dan meningkat di tahun 2023 sebesar 45,03 %, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.4 Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

Mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan 10 tahun terhitung sejak diundangkan jalan provinsi harus sesuai dengan standar. Standar jalan provinsi dilihat dari aspek dimensi jalan (lebar perkerasan jalan minimal 7 m), aspek konstruksi perkerasan jalan (muatan sumbu terberat sebesar 8 ton) dan aspek ketersediaan bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan (saluran drainase dan dinding penahan tanah serta bahu jalan). Sampai dengan tahun 2024, panjang Jalan Provinsi yang telah sesuai dengan standar (dari sisi lebar jalan ≥7 m dan konstruksi sesuai MST 8 ton) sepanjang 1149,053 km atau mencapai 47,09 persen. Penyesuaian standar jalan provinsi perlu dilakukan secara bertahap utamanya untuk penuntasan jalan yang mempunyai nilai strategis dengan tetap menjaga kondisi permukaan seluruh Jalan Provinsi.

Perkembangan kondisi jalan kewenangan provinsi dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi permukaan jalan baik pada tahun 2020 sebesar 90,73% mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 91,46%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

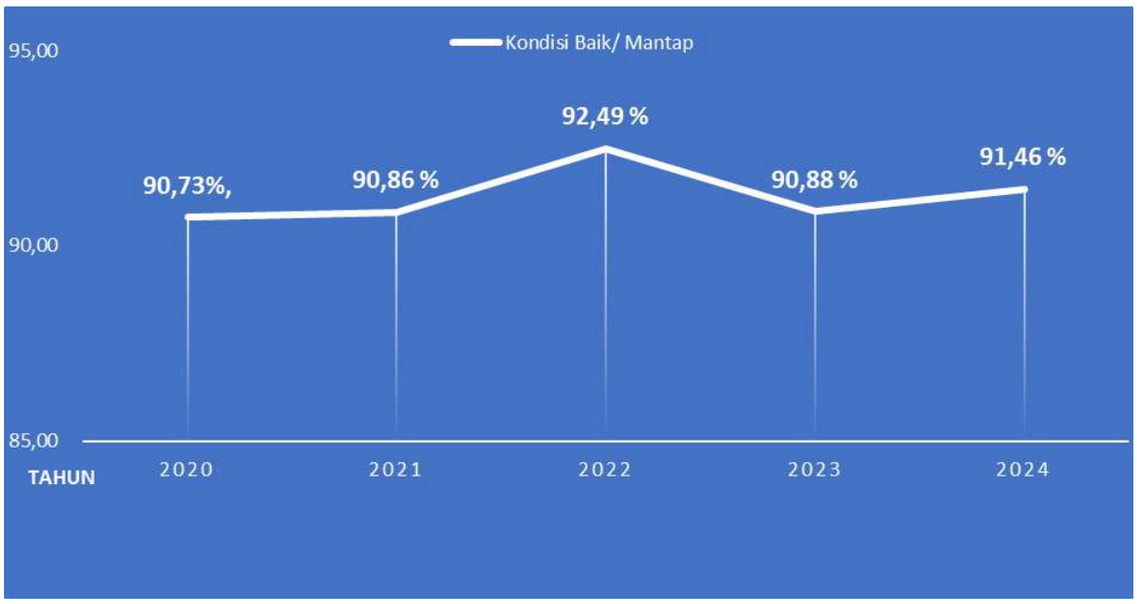

Gambar 2.5 Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.3.2. Gambaran Pelayanan Cipta Karya

Ruang lingkup pelayanan Kecipta karyaan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum antara lain air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah.

2.3.2.1. Air Minum

Cakupan akses layanan air minum layak pada tahun 2024 sebesar 92,29 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 91,40 persen dan termasuk di dalamnya cakupan akses air minum aman pada tahun 2024 sebesar 40,86 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 38,75 persen.

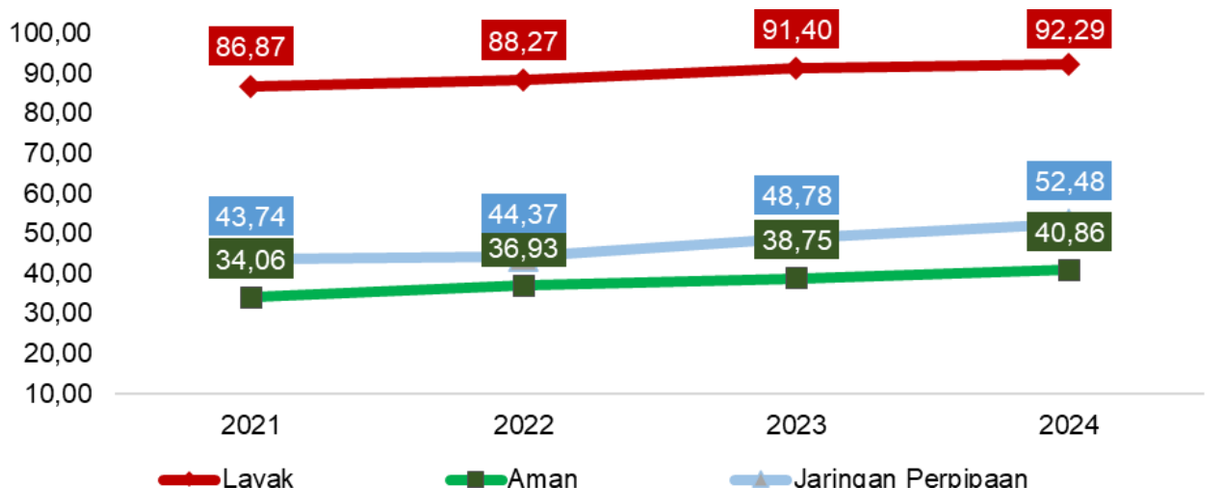

Gambar 2.6 Capaian Akses Layanan Air Minum

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.3.2.2. Air Limbah Domestik

Cakupan akses layanan air limbah domestik layak pada tahun 2024 sebesar 92,42 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 91,40 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses layanan air limbah domestik aman pada tahun 2024 sebesar 9,72 persen menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 9,91 persen dikarenakan :

Layak

a. Program Inpres sanitasi banyak yang ditunda oleh pemerintah pusat dan Kab/Kota tidak melakukan pengembangan atau pembangunan sarana prasarana air limbah domestik;
b. Perbaikan dan perawatan terhadap sarana prasarana air limbah domestik kurang optimal dilakukan Kab/Kota
c. Pertumbuhan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pembangunan sarana prasarana air limbah domestik

Aman

a. Terdapat 6 Kab/Kota yang tidak memiliki IPLT dan tidak ada Pembangunan baru di tahun 2024;
b. Terdapat beberapa Kab/Kota yang tidak mengoperasionalkan IPLT secara optimal;
c. Kab/Kota yang memilik IPLT dengan kapasitas besar dan masih beroperasional dengan tidak baik tidak menerapkan layanan lumpur tinjda terjadwal (L2T2);
d. Sosialisasi pentingnya pengolahan air limbah domestik dari septictank ke IPLT kurang optimal dilakukan Kab/Kota.

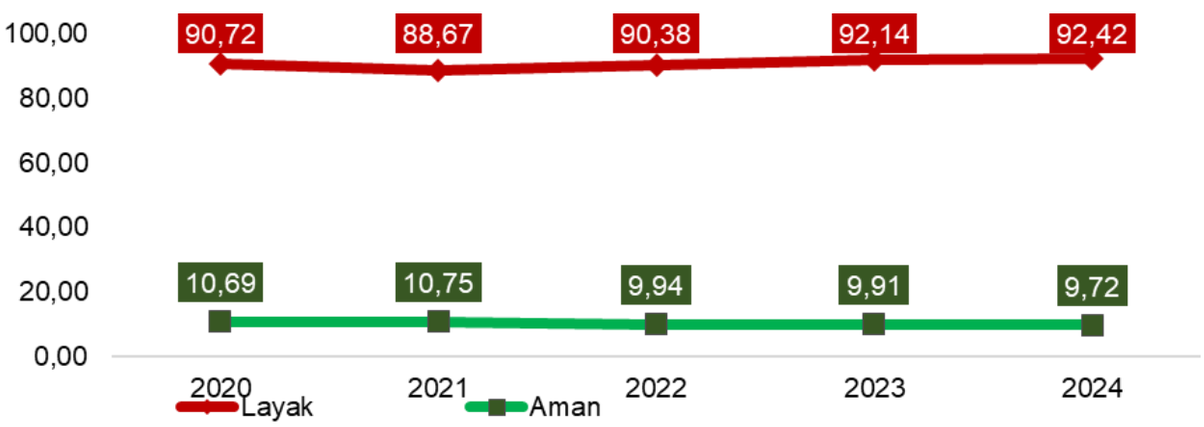

Gambar 2.7 Capaian Akses Sanitasi Air Limbah Domestik

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.3.2.3. Bangunan Gedung Milik Daerah

Hingga tahun 2024, Bangunan Gedung Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1.030 komplek, Pendataan teknis Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah sudah dilakukan terhadap sejumlah 313 komplek.

No	***Lokasi Pendataan Teknis BGMD***	***TA***	***JUMLAH***
1	BGMD Kab, Rembang + Kab, Blora	*2019*	*51*
2	*BGMD Kota + Kab Pekalongan*	*2020*	*36*
3	*BGMD Kab, Pemalang*	*2021*	*27*
4	*BGMD Kab, Brebes*	*2022*	*32*
5	*BGMD Kota + Kab Tegal*	*2023*	*43*
6	*BGMD Kab. Wonogiri*	*2024*	*35*
7	*BGMD Kab. Sukoharjo*	*2024*	*32*
8	*BGMD Kab. Sragen*	*2024*	*29*
9	*BGMD Kab. Karanganyar*	*2024*	*28*
	TOTAL		*313*

Tabel 2.6. Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.3.3. Gambaran Pelayanan Sumber Daya Air

2.3.3.1. Sungai dan Wilayah Sungai

Di Jawa Tengah terdapat 202 daerah aliran sungai (DAS). Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, kewenangan pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah

No	Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Kewenangan	Unit Pengelola
1	Cimanuk Cisanggarung	5	Pemerintah	BBWS Cimanuk Cisanggarung
2	Pemali Comal	32	Provinsi Jawa Tengah	Dinas PUPR Prov. Jawa Tengah
3	Bodri Kuto	12	Provinsi Jawa Tengah	Dinas PUPR Prov. Jawa Tengah
4	Jratun Seluna	69	Pemerintah	BBWS Pemali Juana
5	Wiso Gelis	27	Kabupaten Jepara	Dinas PU Kab. Jepara
6	Karimun Jawa	20	Kabupaten Jepara	Dinas PU Kab. Jepara
7	Bengawan Solo	1	Pemerintah	BBWS Bengawan Solo
8	Progo Opak Serang	1	Pemerintah	BBWS Serayu Opak
9	Serayu Bogowonto	15	Pemerintah	BBWS Serayu Opak
10	Citanduy	20	Pemerintah	BBWS Citanduy

Tabel 2.8. Debit Banjir Rerata Tahunan dan Debit Minimum Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah

No	Wilayah Sungai	Debit Banjir Rerata Tahunan (m^3/dt)	Debit Andalan *Dependable 80%* (m^3/dt)
1	Cimanuk Cisanggarung	290.41	0.49
2	Pemali Comal	5849.54	17.46
3	Bodri Kuto	2064.31	1.45
4	Jratun Seluna	6934.10	14.66
5	Wiso Gelis	392.39	0.78

6	Karimun Jawa	10.68	0.02
7	Bengawan Solo	233.71	1.38
8	Progo Opak Serang	1209.26	2.41
9	Serayu Bogowonto	4538.41	9.07
10	Citanduy	1200.37	2.41

Upaya peningkatan sarana dan prasarana sungai terus dilakukan. Dalam kurun waktu 2018-2024 pada wilayah sungai kewenangan provinsi (WS Bodri Kuto dan WS Pemali Comal) telah dilakukan normalisasi sepanjang 30.172 meter, pemasangan sheet pile sepanjang 1.675 meter, parapet 14.303 meter dan laydam bronjong sepanjang 2.607,5 meter.

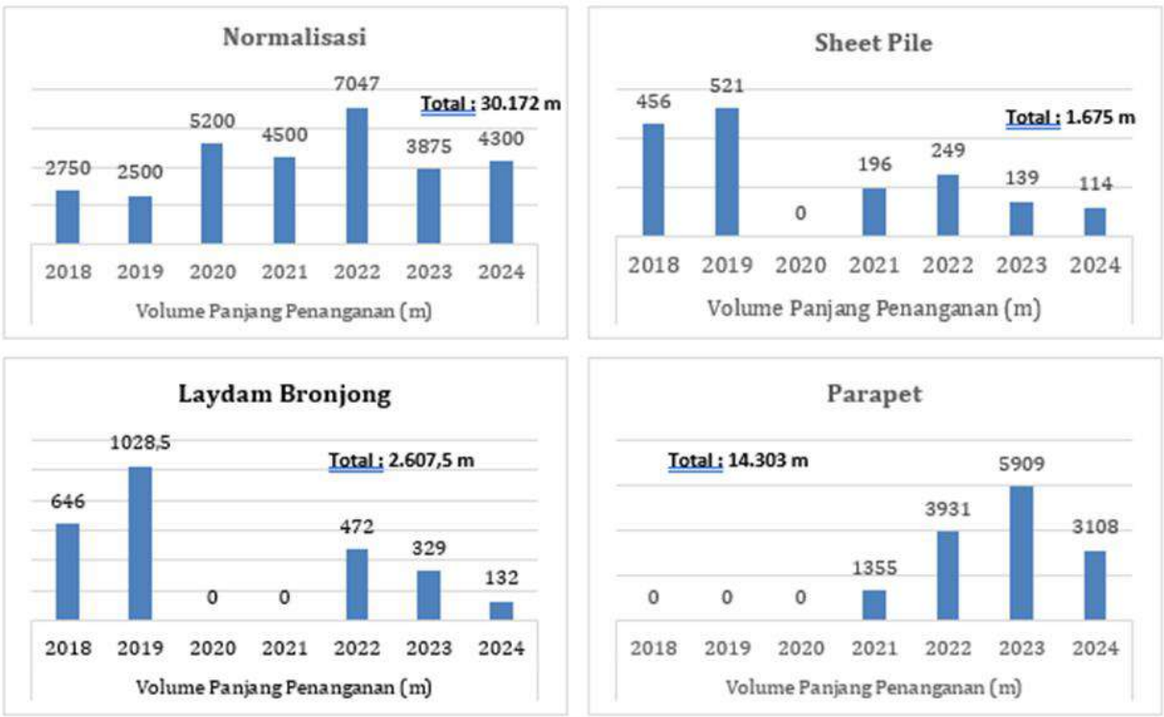

Gambar 2.8 Progress Penanganan Sungai Tahun 2018-2024

Melalui optimalisasi operasi dan pemeliharaan serta pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sungai (kewenangan provinsi) tersebut, secara fisik sungai dalam kondisi baik semakin meningkat menjadi 52,36% di Tahun 2024.

Gambar 2.9 Presentase Fisik Sungai Dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2024

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Banjir	84	160	142	80	52	74	59	136	192	85	111
Putting Beliung	111	138	126	118	66	120	151	211	386	244	421
kekeringan	8	0	19	63	12	3	2	0	3	30	29
Tanah Longsor	120	152	174	81	50	139	167	250	489	161	290
Abrasi	1	0	1	2	4	0	0	2	0	5	3
Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LGA	0	4	1	0	1	2	0	0	1	8	0
Karhutla	0	0	4	0	1	1	10	1	1	70	76
Gempa Bumi	1	2	1	0	2	4	1	0	9	1	2

Gambar 2.10 Kecenderungan Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2019

Sumber: Dokumen Kajian Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah 2022-2026

Upaya penanganan darurat banjir tetap perlu dilaksanakan, karena kejadian banjir dan rob masih menjadi masalah dasar yang perlu ditangani secara serius. Menurut Dokumen Kajian Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah 2022-2026 tingkat resiko banjir masih masuk kelas tinggi.

Tabel 2.9. Tingkat Resiko Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
	Kabupaten				
1	CILACAP	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	BANYUMAS	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3	PURBALINGGA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4	BANJARNEGARA	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
5	KEBUMEN	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
6	PURWOREJO	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
7	WONOSOBO	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
8	MAGELANG	TINGGI	SEDANG	TINGGI	SEDANG
9	BOYOLALI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
10	KLATEN	TINGGI	SEDANG	TINGGI	SEDANG
11	SUKOHARJO	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
12	WONOGIRI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
13	KARANGANYAR	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
14	SRAGEN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
15	GROBOGAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
16	BLORA	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
17	REMBANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
18	PATI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
19	KUDUS	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
20	JEPARA	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
21	DEMAK	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
22	SEMARANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
23	TEMANGGUNG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
24	KENDAL	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
25	BATANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
26	PEKALONGAN	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
27	PEMALANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
28	TEGAL	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
29	BREBES	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
	Kota				
1	KOTA MAGELANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
2	KOTA SURAKARTA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3	KOTA SALATIGA	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4	KOTA SEMARANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
5	KOTA PEKALONGAN	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
6	KOTA TEGAL	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
Provinsi Jawa Tengah		**TINGGI**	**TINGGI**	**TINGGI**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Kajian Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah 2022-2026

2.3.3.2. Tampungan Air

Di Jawa Tengah terdapat 11 unit Bendungan Besar (volume > 10 jt m3), 34 unit Bendungan Kecil (volume < 10 jt m3), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10. Bendungan di Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama Bendungan	Kabupaten	Layanan Irigasi (Ha)	Volume	Elevasi	Manfaat
				Juta m3		
1	Malahayu	Brebes	35.162	31,14	54,5	Irigasi, Banjir
2	Cacaban	Tegal	17.481	45,13	76,91	Irigasi, Banjir
3	Rawapening	Semarang	19.972	49,9	462,9	Irigasi, Air baku, Banjir
4	Kedungombo	Grobogan	59.544	689,09	86,89	Irigasi, PLTA, Industri dan Air baku, Banjir
5	Wonogiri	Wonogiri	28.109		135,6	
6	Sempor	Kebumen	6.485	38,04	72	Irigasi, PLTA, Air baku, Banjir
7	Wadaslintang	Kebumen	31.109	388,72	174,03	Irigasi, PLTA, Air baku, Banjir
8	Sudirman	Banjarnegara	8.400	23,24	228,18	Irigasi, PLTA, Air baku
9	Pidekso	Wonogiri	1.500	25	185	Irigasi, Air Baku, PLTA, Pengendali Banjir, Pariwisata
10	Logung	Kudus	5.296	20,15	88,5	Irigasi, Air Baku, PLTMH (baru)
11	Randugunting	Blora	630	10,41	94,27	Irigasi, Air Baku, Pengendali Banjir, Pariwisata
12	Jatibarang	Semarang	-	17,67	148,72	Air baku
13	Penjalin	Brebes	28.310	7,77	339,5	Irigasi, Banjir
14	Gembong	Pati	4.959	9,5	206,72	Irigasi
15	Gunungrowo	Pati	6.052	5,15	318,55	Irigasi
16	Tempuran	Blora	923	2,09	117,25	Irigasi, Air baku
17	Greneng	Blora	251	2,35	119,13	Irigasi
18	Lodanwetan	Rembang	440	4,6	44,2	Irigasi
19	Banyukuwung	Rembang	775	2,42	49,32	Irigasi, Air baku
20	Nglangon	Grobogan	750	1,09	76,33	Irigasi
21	Simo	Grobogan	482	0,43	80,5	Irigasi
22	Butak	Grobogan	366	0,25	62,77	Irigasi
23	Sanggeh	Grobogan	260	0,39	45,97	Irigasi
24	Gondang	Karanganyar	4.680	9,15	324,67	Irigasi, Air Baku, PLTA, Pengendali Banjir, Pariwisata
25	Krisak	Wonogiri	340	2,34	112,98	Irigasi
26	Plumbon	Wonogiri	392	0,32	204	Irigasi
27	Songputri	Wonogiri	394	0,43	224	Irigasi
28	Parangjoho	Wonogiri	707	0,77	194,82	Irigasi
29	Kedunguling	Wonogiri	92	0,33	165,48	Irigasi
30	Nawangan	Wonogiri	319	0,71	227,96	Irigasi
31	Ngancar	Wonogiri	635	1,71	248,26	Irigasi
32	Lalung	Karanganyar	2.000	4,4	151,12	Irigasi
33	Delingan	Karanganyar	1.126	3,31	204,42	Irigasi
34	Gebyar	Sragen	1.531	0,65	324,67	Irigasi
35	Kembangan	Sragen	358	0,71	128,78	Irigasi
36	Botok	Sragen	2.488	0,48	282,96	Irigasi

No.	Nama Bendungan	Kabupaten	Layanan Irigasi (Ha)	Volume	Elevasi	Manfaat
				Juta m3		
37	Ketro	Sragen	426	2,89	98,19	Irigasi
38	Blimbing	Sragen	295	0,08	189,4	Irigasi
39	Brambang	Sragen	708	0,1	171,3	Irigasi
40	Cengklik	Boyolali	1.567	9,87	139,96	Irigasi
41	Klego	Boyolali	1.353	2,67	237,76	Irigasi
42	Jombor	Klaten	53	3,28	118,7	Irigasi
43	Mulur	Sukoharjo	51	2,75	110,3	Irigasi, Air baku
44	Grawan	Rembang	-	0,47	38,74	Air baku
45	Panohan	Rembang	-	0,82	68,95	Air baku

Selain bendungan, juga terdapat embung dan long storage yang jumlahnya sampai dengan Tahun 2024 mencapai 1.161 unit, dibangun melalui sumber pendanaan APBN, APBD maupun CSR/TJSLP, dimanfaatkan untuk tampungan air sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air baku bagi masyarakat.

Tabel 2.11. Embung dan Longstorage di Provinsi Jawa Tengah (kondisi sd. Tahun 2025)

No	INSTANSI/LEMBAGA	SUMBER PENDANAAN	EMBUNG (lokasi)	*LONG STORAGE (lokasi)*	JUMLAH (lokasi)
1.	Pemerintah Pusat (BBWS)	APBN	142	3	145
	BNPB	APBN	2	0	2
2.	Dinas PUPR	APBD	84	17	101
3.	Distanbun	APBD	4	0	4
		APBN	512	0	512
4.	DLHK	DAK	390	0	390
5.	Pemkab (Bankeu)	APBD	13	0	13
6.	CSR/TJSLP	Hibah	3	0	3
TOTAL			**1.144**	**20**	**1.169**

Pembangunan embung dan longstorage melalui APBD pada Dinas PUPR sebanyak 101 unit dilakukan secara bertahap, paling banyak pembangunannya pada Tahun 2017, dengan sebaran lokasi pembangunan sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.12. Sebaran Pembangunan Embung dan Longstorage di Provinsi Jawa Tengah (kondisi sd. Tahun 2025)

No	Lokasi Pembangunan	Jumlah (unit)
1	Kabupaten Semarang	2
2	Kabupaten Kebumen	1
3	Kabupaten Rembang	4
4	Kabupaten Kendal	9
5	Kabupaten Purworejo	2
6	Kabupaten Tegal	10
7	Kabupaten Grobogan	5
8	Kabupaten Brebes	14
9	Kabupaten Wonogiri	15

No	Lokasi Pembangunan	Jumlah (unit)
10	Kabupaten Cilacap	7
11	Kabupaten Pati	7
12	Kabupaten Klaten	2
13	Kabupaten Boyolali	1
14	Kabupaten Sragen	5
15	Kabupaten Karanganyar	1
16	Kabupaten Pekalongan	4
17	Kabupaten Blora	5
18	Kabupaten Purbalingga	2
19	Kabupaten Banyumas	1
20	Kabupaten Demak	1
21	Kabupaten Pemalang	1
22	Kabupaten Temanggung	1
23	Kota Semarang	1
Total		**101**

Gambar 2.11 Jumlah Embung Yang Dibangun Melalui APBD Pada Dinas PUPR Prov. Jawa Tengah Tahun 2013-2025

Dengan jumlah embung yang terbangun di Provinsi Jawa Tengah, masih belum dapat menurunkan tingkat resiko bencana kekeringan. Karena masih tingginya tingkat resiko bencana kekeringan maka perlu ditingkatkan jumlah embung, terutama pada daerah kabupaten kota yang masih tinggi kelas resikonya.

Tabel 2.13. Tingkat Resiko Bencana Kekeringan di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
	Kabupaten				
1	CILACAP	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	BANYUMAS	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3	PURBALINGGA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4	BANJARNEGARA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
5	KEBUMEN	SEDANG	SEDANG	TINGGI	SEDANG
6	PURWOREJO	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
7	WONOSOBO	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
8	MAGELANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
9	BOYOLALI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
10	KLATEN	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
11	SUKOHARJO	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
12	WONOGIRI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
13	KARANGANYAR	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
14	SRAGEN	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
15	GROBOGAN	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
16	BLORA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
17	REMBANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
18	PATI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
19	KUDUS	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
20	JEPARA	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
21	DEMAK	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
22	SEMARANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
23	TEMANGGUNG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
24	KENDAL	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
25	BATANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
26	PEKALONGAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
27	PEMALANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
28	TEGAL	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
29	BREBES	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
	Kota				
1	KOTA MAGELANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
2	KOTA SURAKARTA	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3	KOTA SALATIGA	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4	KOTA SEMARANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
5	KOTA PEKALONGAN	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
6	KOTA TEGAL	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
	Provinsi Jawa Tengah	**TINGGI**	**TINGGI**	**TINGGI**	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Kajian Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah 2022-2026

2.3.3.3. Bendung

Bendung sebanyak 236 buah terdiri beberapa tipe, antara lain :

a. Bendung gerak dengan pintu terdiri dari :
   - Pintu radial, misalnya Bendung Klambu, Bendung Serayu.
   - Pintu sorong (*slice gate*) misalnya Bendung Manganti, Bendung Dumpil, Bendung Colo, Semen Krinjo, Tuk Kuning, Bantar Helang.
   - Bendung gerak kembang kempis atau bendung karet, misalnya Bendung Karet Kumpulan, Bendung Karet Jajar.

b. Bendung permanen/tetap dari pasangan batu Beton, misalnya bendung Kedung Asem, Bendung Arca.
c. Bendung karet
d. Bendung gergaji, misalnya bendung Penggaron.
e. Bendung dengan kantong lumpur, misalnya bendung Kedungboyo, bendung Piasa.

2.3.3.4. Jaringan irigasi

Sektor pertanian yang masih menjadi komoditas utama di Jawa Tengah, sangat memerlukan dukungan dalam hal distribusi air irigasi untuk pertanian. Sebagai organisasi perangkat daerah yang salah satunya memiliki fungsi pelayanan terhadap irigasi, Dinas PUPR memiliki tanggung jawab terhadap 108

Daerah Irigasi (DI) dengan luas 86.865 Ha yang menjadi kewenangan provinsi, dari total keseluruhan daerah irigasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 11.542 DI seluas 953.804 Ha. Sedangkan 33 DI dengan luas 347.674 Ha menjadi kewenangan pusat dan 11.401 DI dengan luas 519.265 Ha kewenangan kabupaten/kota.

a. Bangunan irigasi, meliputi :
   1) Bangunan bagi, bagi sadap, dan sadap sebanyak 6.767 buah.
   2) Bangunan pelengkap, antara lain gorong-gorong, *syphon*, talang, jembatan sebanyak 11.289 buah.

b. Saluran irigasi, meliputi :
   1) Saluran induk/primer sepanjang : 1.109,08 km.
   2) Saluran sekunder sepanjang : 3.716,91 km.
   3) Saluran pembuang sepanjang : 314,58 km.

Upaya untuk menjaga dan meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi diwujudkan melalui pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Perbaikan jaringan irigasi (kewenangan provinsi) yang dilakukan dalam kurun waktu 2013-2023 memberikan kontribusi outcome berupa luasan sawah yang terairi setelah dilakukan perbaikan jaringan irigasi dengan total luas 30.579 hektar.

Tabel 2.14. Output Perbaikan Irigasi (Kewenangan Provinsi)

Tahun	Jumlah Lokasi	Output		
		Bendung (bh)	Saluran (m)	Bangunan (bh)
2013	36	4	32.127	89
2014	48	5	41.550	73
2015	55	4	23.500	36
2016	49	2	29.270	28
2017	35	2	12.505	18
2018	30	4	12.349	24
2019	36	4	14.383	15
2020	41	-	1.155	-
2021	21	2	11.515	7
2022	27	1	17.089	18
2023	45	5	9.931	28
2024	24	2	2.900	2

Gambar 2.12 Manfaat (Outcome) Perbaikan Irigasi Tahun 2013-2024

Melalui optimalisasi operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi, fisik irigasi dalam kondisi baik semakin meningkat menjadi 84,50% di Tahun 2023.

Gambar 2.13 Presentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2018-2023

Upaya untuk menjaga dan meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi diwujudkan melalui pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Mengikuti perubahan pada RPD 2024-2026, Indikator kinerja berubah menjadi Indeks Kinerja Sistem Irigasi dengan capaian tahun 2024 sebesar 69,11 (angka).

2.3.3.5. Mata Air/ Sumber Air

Jumlah mata air/sumber air se-Jawa Tengah ada 1.455 mata air. Pemanfaatan mata air sebagian besar untuk irigasi pertanian disamping sebagian untuk air baku masyarakat dan perkotaan melalui PDAM.

2.3.3.6. Pantai

Keseluruhan panjang pantai di Jawa Tengah (pantai utara dan pantai selatan) mencapai 828,82 km dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.15. Panjang Pantai di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten	Panjang pantai (Km)
A	**Pantai Utara**	**540,27**
1	Brebes	73,00
2	Kota Tegal	8,50
3	Tegal	30,00
4	Pemalang	35,00
5	Pekalongan	8,00
6	Kota Pekalongan	5,70
7	Batang	38,75
8	Kendal	41,00
9	Kota Semarang	36,60
10	Demak	74,00
11	Jepara	66,22
12	Pati	60,00
13	Rembang	63,50
B	**Pantai Selatan**	**288,55**
1	Wonogiri	16,90
2	Purworejo	48,54
3	Kebumen	90,48
4	Cilacap	132,63
	Total	***828,82***

Dari 17 Kabupaten/ Kota yang memiliki Pantai, hanya Kabupaten Wonogiri yang memiliki risiko rendah bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Kelas Bahaya bencana tersebut provinsi Jawa Tengan berada pada posisi kelas bahaya tinggi, dengan kerentanan sedang dan beresiko sedang. Dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan pentingnya pembangunan bangunan pengaman pantai sebagai bentuk pengendalian daya rusak air.

Tabel 2.16. Tingkat Resiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
	Kabupaten				
1	CILACAP	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
2	KEBUMEN	TINGGI	SEDANG	TINGGI	SEDANG
3	PURWOREJO	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4	WONOGIRI	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
5	REMBANG	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG
6	PATI	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG
7	JEPARA	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
8	DEMAK	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG
9	KENDAL	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
10	BATANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
11	PEKALONGAN	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG
12	PEMALANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
13	TEGAL	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
14	BREBES	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG
	Kota				
1	KOTA SEMARANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
2	KOTA PEKALONGAN	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3	KOTA TEGAL	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
	Provinsi Jawa Tengah	**TINGGI**	**SEDANG**	**TINGGI**	**SEDANG**

Sumber: Dokumen Kajian Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah 2022-2026

2.3.3.7. Kesiapsiagaan Banjir

Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah memiliki prasarana kesiapsiagaan banjir seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.17. Ketersediaan Prasarana Kesiapsiagaan Banjir

No	Pengelola	Unit	Kapasitas	Jumlah
1	Balai PSDA Pemali Comal	Mobile Pump Trailer	150 Lt/dtk	1 buah
			250 Lt/dtk	1 buah
		Mobile Pump Truck	250 Lt/dtk	2 buah
		Pompa Portable (Model Jinjing)		1 buah
		Pompa Portable (Model Trailer)		4 buah
		Motor Vixion		5 buah
		Roda 3		1 buah
2	Balai PSDA Bodri Kuto	Mobile Pump Trailer	150 Lt/dtk	1 buah
		Mobile Pump Truck	250 Lt/dtk	1 buah
		Pompa Portable (Model Trailer)		4 buah
		Motor Vixion		4 buah
		Roda 3		1 buah
3	Balai PSDA Seluna	Mobile Pump Trailer	250 Lt/dtk	1 buah
		Mobile Pump Truck	250 Lt/dtk	1 buah
		Pompa Portable (Model Jinjing)	17 Lt/dtk	1 buah
		Pompa Portable (Model Trailer)	17 Lt/dtk	4 buah
		Motor Vixion		5 buah
		Roda 3		1 buah
4	Balai PSDA Bengawan Solo	Pompa Portable (Model Trailer)	17 Lt/dtk	4 buah
		Motor Vixion		5 buah
		Roda 3		1 buah

No	Pengelola	Unit	Kapasitas	Jumlah
5	Balai PSDA Probolo	Pompa Portable (Model Trailer)	17Lt/dtk	4 buah
		Motor Vixion		4 buah
		Roda 3		1 buah
6	Balai PSDA Serayu Citanduy	Pompa Portable (Model Trailer)	17Lt/dtk	4 buah
		Motor Vixion		6 buah
		Roda 3		1 buah
7	Dinas PUPR Prov. Jateng (Kantor Pusat)	Mobile Pump Trailer	400 Lt/dtk	1 buah
		Mobile Pump Truck	250 Lt/dtk	1 buah
		Pompa Portable (Model Jinjing)	17 Lt/dtk	1 buah
		Motor Vixion		2 buah

2.3.3.8. Hidroklimatologi

Prasarana penunjang pengelolaan sumber daya air mendukung penyediaan data sumber daya air meliputi jaringan stasiun hidroklimatologi dan fasilitas peralatan telekomunikasi terdiri dari:

a. Stasiun Klimatologi : 27 buah
b. Pos Duga Air Sungai : 59 buah
c. Pos Duga Air Bendung : 175 buah.
d. Pos Hujan : 739 buah.
f. Fasilitas telekomunikasi untuk komunikasi Posko banjir

Dalam menunjang program dan kegiatan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai beberapa alat komunikasi untuk menginformasikan kejadian banjir di Provinsi Jawa Tengah. Daftar alat komunikasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.18. Daftar Alat Komunikasi Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah

No	Instansi	Jumlah Peralatan komunikasi posko banjir (bh)	Jenis
1	Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah	5	Repeater Motorola (1 bh), RIG Motorola (1bh), RIG Icom (2 bh) dan RIG Alinco (1 bh)
2	Balai PSDA Bodri Kuto	15	RIG Alinco (8 bh) dan HT (7 bh)
3	Balai PSDA Pemali Comal	13	RIG Icom (12 bh) dan HT (1 bh)
4	Balai PSDA Serang Lusi Juana	15	RIG Icom (4 bh), RIG Alinco (1 bh) dan HT (10 bh)
5	Balai PSDA Bengawan Solo	6	RIG Alinco (1 bh), RIG Motorola (2 bh), RIG Kenwood (2 bh) dan HT (1 bh).
6	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	3	RIG Motorola (1 bh), RIG Icom (2 bh)
7	Balai PSDA Serayu Citanduy	12	RIG Icom (9 bh), Tait 2000 (2 bh), Alinco DR 135 (1 bh)
Jumlah		**69**	

2.3.4. Gambaran Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dinamika pembangunan nasional dan munculnya berbagai macam tantangan pembangunan seperti globalisasi, kerentanan terhadap bencana, dampak perubahan iklim dan pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan wilayah pesisir, keseimbangan perkembangan kawasan barat dan timur Indonesia, isu penanganan perbatasan negara dan kemajuan dalam bidang teknologi menyebabkan pentingnya kesiapan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, penataan kawasan strategis dan pengaturan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan kondisi fisik wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi semua sumber daya yang ada, kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi dan geostrategi, geopolitik dan geoekonomi.

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam mewujudkan tujuan rencana tata ruang melalui rumusan kebijakan dan strategi, tata ruang harus adaptif terdapat faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja rencana tata ruang. Selain itu, penyelenggaraan penataan ruang memiliki azaz keterpaduan dan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan yaitu pengintegrasian kepentingan lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung didalamnya.

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan potensi yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alamnya. Penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah diwujudkan dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menciptakan Provinsi Jawa Tengah yang maju, sejahtera dan mengutamakan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal dan menyeimbangkan, menyerasikan perkembangan antar wilayah, kegiatan antar sektor secara dinamis dalam rangka menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan.

RTRW Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten, penyusunan rencana tata ruang wilayah kota, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan

perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor, dan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Selain sebagai dokumen acuan dan pedoman untuk kepentingan pembangunan wilayah, RTRW Provinsi juga memiliki peran ideal untuk menjabarkan kebijakan-kebijakan Nasional yang tertuang di dalam RTRW Nasional maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional serta menjadi alat koordinasi dan acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menjabarkan kebijakan Nasional dan Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota.

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang serta perubahan kebijakan-kebijakan lainnya terkait peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, mengakibatkan perlunya penyesuaian dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah berupa pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) kedalam RTRWP, yang memuat integrasi antara ruang darat dan ruang laut untuk mencapai target "*One Spatial Planning Policy*" atau satu produk rencana tata ruang.

Gambar 2.14 Proses integrasi materi darat dan pesisir dalam RTRW

Berdasarkan kondisi, tantangan dan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, maka tujuan penataan ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan untuk "mewujudkan ruang wilayah provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir".

Dari tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah selanjutnya dijabarkan kedalam kebijakan penataan ruang sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah;
3. Peningkatan pelestarian kawasan lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim;
4. Pemanfaatan kawasan budi daya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi; dan
7. Peningkatan kawasan pertahanan dan keamanan

Tujuan dan kebijakan penataan ruang diatas menjadi dasar untuk perumusan rencana struktur dan rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis di wilayah provinsi Jawa Tengah. Selain itu, RTRW juga memuat Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang merupakan perangkat untuk mewujudkan tertib ruang. Muatan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

1. Penilaian pelaksanaan Kesesusaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
2. Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang;
3. Pemberian insentif dan disinsentif;
4. Arahan pengenaan sanksi administratif; dan
5. Penyelesaian sengketa penataan ruang.

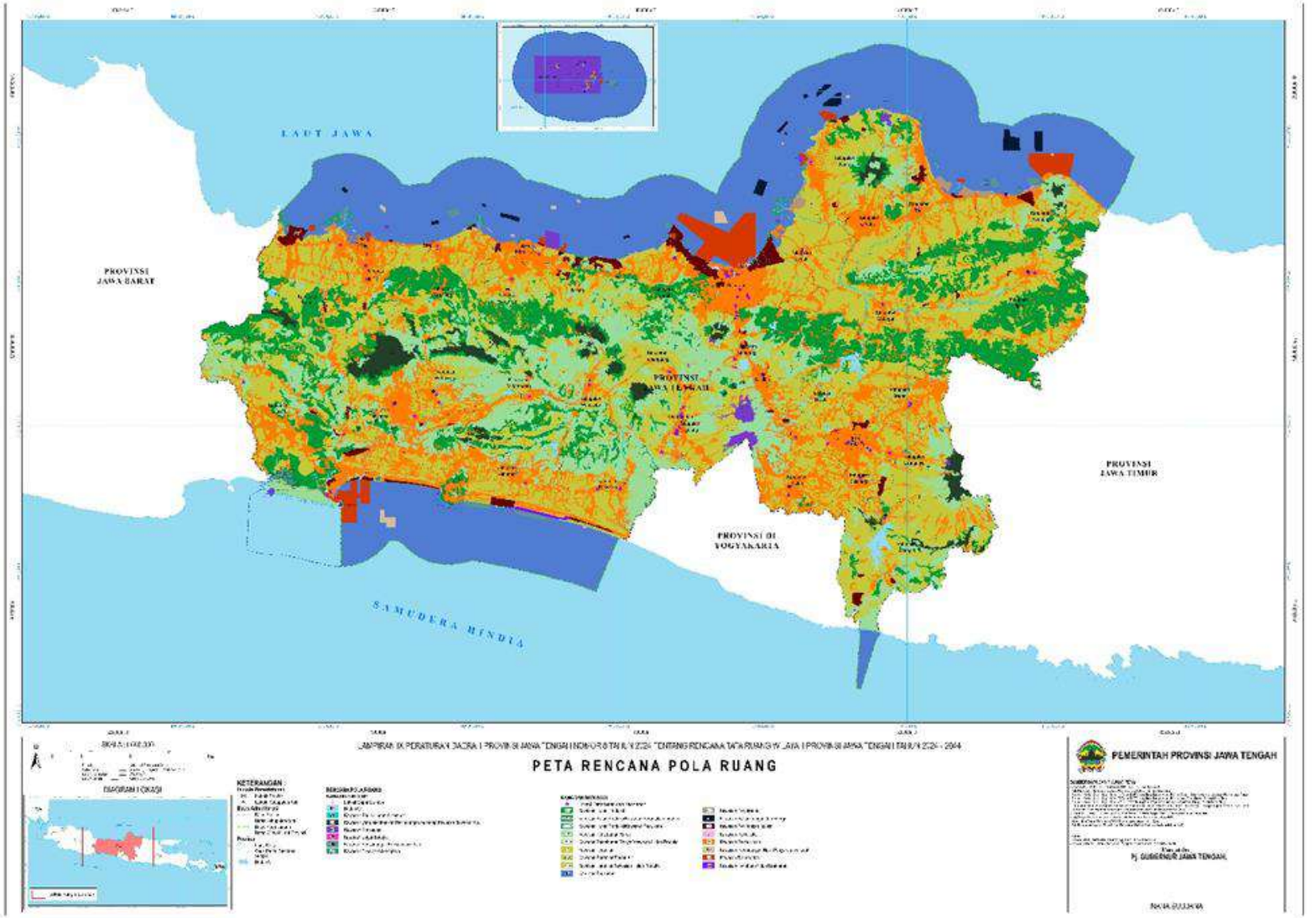

Gambar 2.14 Peta Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi serta peningkatan performa pertumbuhan untuk daerah-daerah yang masih tertinggal maka kabupaten/kota di Jawa Tengah dibagi menjadi beberapa wilayah pengembangan sesuai dengan kesamaan karakteristik, interaksi/pergerakan antar wilayah dan basis ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi, dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi pembangunan dan keterpaduan pengembangan wilayah antar Kabupaten/Kota.

Pada Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah sebelumnya, terdapat 8 (delapan) Wilayah Pengembangan (WP) yaitu WP Kedungsepur, WP Subosukawonosraten, WP Purwomanggung, WP Barlingmascakeb, WP Bregasmalang, WP Petanglong, WP Banglor dan WP Wanarakuti. Namun pada Perda No. 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 dan Perda No. 6 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, terdapat perubahan susunan dan struktur WP yang ada. Perubahan ini didasari atas evaluasi terhadap perkembangan 8 WP dalam rangka proses revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah dan penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari evaluasi tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat Kabupaten/ Kota yang sebenarnya tidak memiliki kesamaan karateristik perkembangan dengan WP-nya sehingga berpotensi menyebabkan akselerasi perkembangan wilayah menjadi terganggu. Oleh karena itu, dilakukan perubahan dari 8 (delapan) menjadi 10 (sepuluh) WP di Jawa Tengah yaitu:

1. WP Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang;
2. WP Cibalingmas, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas;
3. WP Petanglong, meliputi: Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan;
4. WP Kedungsepur, meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan;
5. WP Jekuti, meliputi: Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati;
6. WP Banglor, meliputi: Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang;
7. WP Wonobanjar, meliputi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
8. WP Keburejo, meliputi: Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
9. WP Gelangmanggung, meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
10. WP Subosukawonosraten, meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.

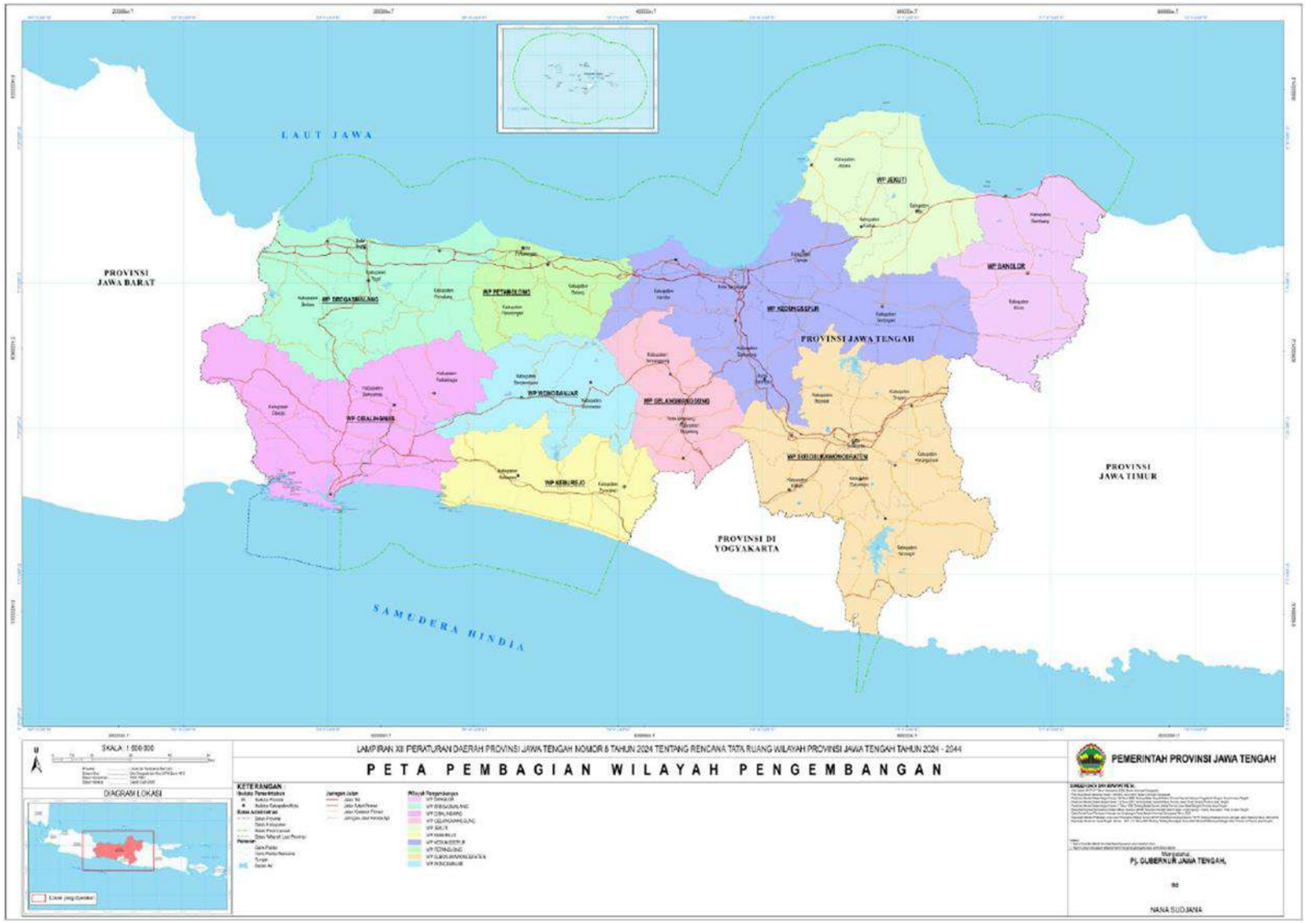

Gambar 2.15 Peta Pembagian Wilayah Pengembangan

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Bidang Penataan Ruang didukung oleh 4 kegiatan yaitu:

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi dengan 2 sub kegiatan yaitu Penetapan RTRW Provinsi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang. Dari kegiatan ini, keluaran yang dihasilkan yaitu:
   1) Telah ditetapkannya Perda No. 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044. Substansi dalam RTRWP tersebut meliputi tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Provinsi Jawa Tengah; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi.
   2) Tersedianya dokumen Kajian Arahan Pengembangan Kewilayahan WP Wonobanjar dan WP Banglor.
   3) Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang, dalam hal ini Perda No. 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah kepada OPD Provinsi dan OPD di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berkaitan dengan bidang Penataan Ruang.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dengan 2 sub kegiatan yaitu Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi. Dari kegiatan ini, keluaran yang dihasilkan yaitu:
   1) Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, baik RTRW maupun RDTR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas PUSDATARU memiliki peranan tugas dan fungsi dalam memberikan pembinaan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi terkait proses peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang, penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang serta arahan terkait posisi penataan ruang terhadap kebijakan sektoral kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Sampai dengan bulan Oktober 2025, terdapat 64 RDTR Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan menjadi Perda/Perkada, terdapat 12 RDTR Kabupaten/Kota yang sedang berproses dengan Kementerian ATR/BPN serta terdapat 100 RDTR yang sedang dalam proses penyusunan. Selain itu, terdapat 19 Kabupaten/Kota yang sedang dan akan melaksanakan proses revisi terhadap RTRWnya.
   2) Tersusunnya Kajian Tematik Sektoral untuk mengkaji potensi dan permasalahan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang serta sebagai upaya untuk updating database dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pada saat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian rencana tata ruang dengan kondisi di lapangan.
   3) Terlaksananya koordinasi antar kementerian/lembaga, pusat, dan daerah untuk memastikan bahwa rencana tata ruang tidak saling

tumpang tindih dan selaras dengan rencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta program-program prioritas.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang yang terdiri dari 3 sub Kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang dengan keluaran antara lain:
   1) Terlaksananya penyebarluasan informasi pemanfaatan ruang melalui sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan juknis terkait dengan pemanfaatan ruang serta pelaksanaan lomba dan seminar dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru).
   2) Terlaksananya operasionalisasi Forum Penataan Ruang yang terdiri dari koordinasi rutin Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, workshop Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota serta fasilitasi penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang dan penerbitan KKPR.
   3) Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Jawa Tengah serta terlaksananya pembinaan penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten/ Kota.
   4) Terlaksananya pembinaan data geospasial terhadap OPD produsen data geospasial di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung Satu Data Jawa Tengah.
   5) Tersusunnya database pemanfaatan ruang sebagai bahan untuk pengembangan sistem informasi bidang penataan ruang.

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan, Dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK), dan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan dengan keluaran antara lain :
   1) Terlaksananya pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang kepada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota.
   2) Terlaksananya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang berupa Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang, Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Pengenaan Sanksi Administratif dan Pemberian Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang.
   3) Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang di lokasi prioritas kewenangan Provinsi Jawa Tengah.
   4) Terlaksananya pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang (TURBINLAK) dan kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang melalui SIWASTEK terhadap 35 Kab/Kota.
   5) Terlaksananya pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan di Provinsi Jawa Tengah.
   6) Tersedianya dokumen Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

7) Tersusunnya database pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib ruang.

Dalam perjalanannya Program Penyelenggaran Penataan Ruang mengalami perubahan indikator sebagai dampak perubahan kebijakan pemerintah dan dinamika pembangunan. Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19. Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2021-2025

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekom Gub	21,42	33	50,14				
Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun	6,67	6,67	8,65				
Persentase Dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun				21,98	45		
Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi				71,51	107,22		
Persentase ketersediaan rencana tata ruang						62,86	68,21
Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	72	73,53	75,00	77,68	81,64		
Persentase implementasi pemanfaatan ruang						68	76
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	71,5	72,6	73,67	76,7	78,9		
Persentase tertib ruang						56	48

2.3.5. Evaluasi Renstra 2018 – 2023 dan Renstra 2024-2026

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.v

Panjang jalan Provinsi tahun 2023 masih mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah no 620/2 tahun 2016 tentang penetapan status ruas jalan sebagai jalan Provinsi Jawa Tengah dengan Panjang jalan Provinsi sebesar 2404,741 Km. Kondisi Jalan permukaan mantap Tahun 2023 sebesar 90,88%, dengan rincian dalam kondisi baik 69,50%% atau 1.671,36km, sedang 21,38% atau 514,12 km, rusak ringan 5,44% atau 130,82km dan rusak berat 3,68% atau 88,46 km.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 622/31 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa tengah No. 622/2 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah, panjang Jalan Provinsi menjadi 2.440,12 km. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2024 dalam kondisi baik 64,94% atau 1.584,63 km, sedang 26,53 % atau 647,33 km, rusak ringan 5,41 % atau 131,92 km dan rusak berat 3,12% atau 76,24 km.

Jumlah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi sebanyak 108 Daerah Irigasi. Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi Tahun 2023 sebesar 84,5%. Sedangkan Indeks kinerja sistem irigasi pada tahun 2024 sebesar 69,11

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan terhadap dua Wilayah Sungai yaitu WS Pemali Comal dan WS Bodri Kuto. Persentase sungai dalam kondisi baik pada tahun 2023 tercapai sebesar 52,36%. Sedangkan pada tahun 2024 Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi tercapai sebesar 52,37%.

Berdasarkan evaluasi indikator kinerja secara keseluruhan dapat tercapai, untuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dapat dicermati pada Tabel 2.20 dan untuk Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dapat dicermati pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.20. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
A 1	**Meningkatkan kualitas dan kapasitas sesuai dengan standar jalan provinsi sebagai jalan kolektor**																			
1	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%				39,16	41,12	42,97	44,39		39,68	41,56	43,5	44,7		101,33	101,07	101,23	100,7	
A 1.1	**Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor**																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%				39,16	41,12	42,97	44,39		39,68	41,56	43,5	44,7		101,33	101,07	101,23	100,7	
A 1.1.1	**Program Penyelenggaraan Jalan**																			
1	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%				36,48	38	40,98	42,67		37,16	38,98	40,78	42,16		101,86	102,58	99,51	98,8	
2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%				41,84	44,24	44,93	46,03		42,27	44,22	46,32	47,47		101,03	99,95	103,09	103,13	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Persentase panjang jalan yang dileger	%				97,05	98,43	99,71	100		96,3	97,59	99,71	100		99,23	99,15	100	100	
4	Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	%				100	100	100	100		33,33	100	100	100		33,33	100	100	100	
5	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%				94,62	95,33	82,11	100		93,05	57,06	85,33	100		98,34	59,86	103,92	100	
6	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%				77,5	85	88,61	100		90,56	92,8	114,86	100		116,85	109,18	129,62	100	
7	Persentase perencanaan, pengawasan dan pengadaan lahan yang terlaksana	%				0	0	100	100		0	0	83,33	100		0	0	83,33	100	
A 1.2	**Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan**																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	bangunan pelengkap jalan baik																			
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik.	%				90,8	91,5	91,6	92,1		90,73	90,86	92,49	95,3		99,92	99,3	100,97	103,47	
	Rasio kemantapan jalan	%		92,1																
A 1.2.1	**Program Penyelenggaraan Jalan**																			
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%				87,23	87,72	87,67	88,02		87,14	95,39	93,63	96,46		99,9	108,74	106,8	109,59	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%				84,05	84,96	84,24	84,92		83,47	83,79	84,24	86,09		99,31	98,62	100	101,38	
3	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%				95,04	95,7	95,72	96,19		94,99	94,52	96,05	95,71		99,95	98,77	100,34	99,5	
4	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%				85,67	86,9	86,07	86,99		84,98	85,45	86,07	88,44		99,19	98,33	100	101,67	
5	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%				90,79	91,18	91,15	91,43		90,73	95,9	89,23	98,29		99,93	105,18	97,89	107,5	
6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%				81,55	82,46	81,74	82,43		80,98	81,29	81,74	86,09		99,3	98,58	100	104,44	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%				96,46	97,05	97,29	97,71		96,42	94,63	98,69	96,06		99,96	97,51	101,44	98,31	
8	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%				83,45	84,34	84,13	84,8		83	83,68	84,13	85,46		99,46	99,22	100	100,78	
9	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%				90,8	91,46	91,65	92,12		90,83	95,53	93,01	95,49		100,03	104,45	101,48	103,66	
10	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%				91,45	92,41	91,89	92,61		90,91	91,42	91,89	93,6		99,41	98,93	100	101,07	
11	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik	%				96,27	96,93	96,96	97,43		96,18	91,52	83,33	91,92		99,91	94,42	85,94	94,34	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	BPJ Wilayah Wonosobo																			
12	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%				92,51	93,55	92,92	93,7		91,92	92,4	92,92	94,85		99,36	98,77	100	101,23	
13	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%				86,61	87,32	87,44	87,94		86,58	89,86	97,69	91,89		99,97	102,91	111,72	104,49	
14	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%				91,04	92,25	91,49	92,4		90,29	90,88	91,49	93,77		99,18	98,51	100	101,48	
15	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%				81,94	82,96	83,49	84,21		81,88	77,68	84,87	80,61		99,93	93,64	101,65	95,72	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%				87,54	89,14	88,82	90,02		86,65	88,03	88,82	91,13		98,98	98,75	100	101,23	
17	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%				92,01	93,13	93,35	94,15		91,86	92,24	96,5	93,92		99,84	99,04	103,37	99,76	
18	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%				91,45	93,49	92,66	94,19		90,38	91,63	92,66	94,73		98,83	98,01	100	100,57	
A 2	**Meningkatkan Pelayanan Keciptakaryaan : Air Minum, Sanitasi, Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dan Jasa Kontruksi**																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-					0	0	0	0		0	0	0	0						
2	Persentase jumlah pelayanan air minum dan sanitasi serta bangunan gedung milik daerah menuju baik	%				0	0	51,07	52,36		0	0	51,59	52,39		0	0	101,02	100,06	
A 2.1	**Meningkatnya akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat**																			
1	Persentase akses aman air aman perkotaan	%				88,15	90,15	92,15	94,15		88,23	90,32	0	0		100,09	100,19	0	0	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Persentase akses aman air aman perdesaan	%				78,05	79,8	81,55	83,3		81,98	83,42	0	0		105,04	104,54	0	0	
3	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%				85,5	87,5	92,8	93,9		90,72	88,67	0	0		106,11	101,34	0	0	
4	Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat	%				0	0	88,83	90,45		0	0	88,97	90,45		0	0	100,16	100	
A. 2.1.1	**Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi**																			
1	Persentase akses air minum perkotaan	%				88,15	90,15	92,15	94,15		88,23	90,32	92,45	94,15		100,09	100,19	100,33	100	
2	Persentase akses air minum perdesaan	%				85,5	87,5	81,55	83,3		81,98	83,42	84,08	83,3		95,88	95,34	103,1	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A. 2.1.1	**Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum**																			
1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota	%		100		0	0	89,39	100		0	0	89,39	100		0	0	100	100	
A 2.1.2	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%				85,5	87,5	92,8	93,9		90,72	88,67	90,38	91,5		106,11	101,34	97,39	97,44	
	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%		93,9																
A 2.2	**Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi tenaga ahli konstruksi**																			
1	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%				12,18	13,2	13,3	14,27		11,37	12,42	14,21	15,23		93,35	94,09	106,84	106,73	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A 2.2.1	**Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi**																			
1	Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%				12,18	13,2	13,3	14,27		11,37	12,42	0	0		93,35	94,09	0	0	
2	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%				11,86	14,13	16,54	19,09		11,86	14,13	0	0		100	100	0	0	
A 2.2.1	**Program Penataan Bangunan Gedung**																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%				12,18	13,2	13,3	14,27		11,37	12,42	14,21	15,23		93,35	94,09	106,84	106,73	
A 2.2.2	**Program Penataan Bangunan Lingkungannya**																			
1	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya	%				0	0	13,3	14,27		0	0	14,21	15,23		0	0	106,84	106,73	
A 2.2.3	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**																			
1	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%				11,86	14,13	16,54	19,09		11,86	14,13	16,54	19,09		100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%				0	0	100	100		0	0	100	100		0	0	100	100	
	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%		100																
B	**Renstra PD Tahun 2024-2026**																			
B 1	**Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi**																			
1.	Persentase jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor dan kondisi permukaan mantap	%								69,14					69,27					100,19
B.1.1	**Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas**																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor																			
1	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%								45,09					47,09					104,44
B.1.1.1	**Program Penyelenggaraan Jalan**																			
1	Persentase panjang jalan yang dileger	%								75,79					75,79					100,00
2	Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	%								100					100					100,00
3	Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung	%								100					100					100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	penyelenggaraan jalan																			
4	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%								39,74					48,31					121,57
5	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	%								45,41					45,76					100,77
6	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%								40,32					35,55					88,17
7	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%								31,88					31,88					100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.1.2	**Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap**																			
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaaan mantap	%								93,2					91,46					98,13
2	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%								91,18					84,53					92,71
B.1.2.1	**Program Penyelenggaraan Jalan**																			
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	%								96,51					93,65					97,04
2	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	%								86,14					77,53					90,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	%								95,76					91,93					96,00
4	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	%								88,49					87,05					98,37
5	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	%								98,34					91,91					93,46
6	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	%								83,65					88,38					105,65
7	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ	%								96,11					93,31					97,09

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Wilayah Semarang																			
8	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	%								85,51					91,56					107,08
9	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	%								95,54					92,2					96,50
10	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	%								93,65					75,17					80,27
11	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ	%								91,97					92,55					100,63

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Wilayah Wonosobo																			
12	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	%								94,9					92,88					97,87
13	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	%								91,94					88,11					95,83
14	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	%								93,82					87,68					93,46
15	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	%								80,66					89,6					111,08

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	%								91,18					68,19					74,79
17	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	%								93,97					91,57					97,45
18	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	%								94,78					91,56					96,60
B 2	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan**																			
1	Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%								33,77					33,33					98,70

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.2.1	**Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah**																			
1	Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	%	%						49,42					49,42					100,00
B.2.1.1	**Program Penataan Bangunan Gedung**																			
1	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%								5,83					5,83					100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%								11,94					11,94					100,00
B.2.1.2	**Program Pemngembangan Jasa Konstruksi**																			
1	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%								45,38					45,38					100,00
2	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%								43,49					43,49					100,00
B.2.2	**Meningkatnya Akses Air Minum Aman**																			
1	Persentase akses air minum aman	%								40,93					40,86					99,83
B.2.2.1	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan**																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Sistem Penyediaan Air Minum																			
1	Persentase akses air minum layak	%								92,42					92,29					99,86
2	Persentase akses air minum jaringan perpipaan	%								54,82					52,48					95,73
3	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%								100					100					100,00
B.2.3	**Meningkatnya Akses Air**																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Limbah Domestik Aman																			
1	Persentase akses air limbah domestik aman	%								10,97					9,72					88,61
B.2.3.1	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**																			
1	Persentase akses air limbah domestik layak	%								93,58					92,42					98,76

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2020-2024

Tabel 2.21. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Tujuan 1																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-	80	80	80	80	-	80	85	85	85	-	100	106,25	106,25	106,25	-
	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah	Angka	-	-	-	-	-	-	-	31,45	-	-	-	-	69,92	-	-	-	-	222,32
	Sasaran 1																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-	80	80	80	80	-	80	85	85	85	-	100	106,25	106,25	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	85	-	-	-	-	100
	Nilai Sakip PD	Angka	-	-	-	74	76	78	80	-	80,54	81,68	82,91	84,3	-	108,84	107,47	106,29	105,38	-
	Indeks Manajemen Risiko Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah	Angka	-	-	-	-	-	-	-	3,15	-	-	-	-	2,91	-	-	-	-	92,38
B	Tujuan 2																			
	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air	%	-	-	-	63,87	65,14	66,41	67,69	-	63,27	64,06	65,81	67,62	-	99,06	98,34	99,1	99,90	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	dan penataan ruang																			
	Indeks Pelayanan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang	Angka	-	-	-	-	-	-	-	61,67	-	-	-		61,67	-	-	-	-	100
	Sasaran 1																			
	Persentase Kualitas sarana dan prasarana sumber daya air	%	-	-	-	54,24	55,04	55,83	56,62	-	53,47	53,79	54,43	54,98	-	98,58	97,72	97,49	97,10	-
	Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	-	-	-	-	-	-	-	61,78	-	-	-	-	61,78	-	-	-	-	100
	Program																			
	Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	41,51	61,64	81,13	100	-	23,27	28,3	45,28	60,38	-	56,06	45,91	55,81	60,38	-
	Persentase penyediaan rencana teknis terhadap	%	-	-	-	-	-	-	-	61,31	-	-	-	-	61,31	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air																			
	Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi	%	-	-	-	83	83,5	84	84,5	-	82,32	82,6	82,8	83	-	99,18	98,92	98,57	100	-
	Indeks kinerja sistem irigasi	Angka	-	-	-	-	-	-	-	69,11	-	-	-	-	69,11	-	-	-	-	100
	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	%	-	-	-	62,8	83,5	64,8	65,8	-	61,39	61,5	62	62,5	-	97,75	73,65	95,68	94,98	-
	Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	-	-	-	64,31	-	-	-	-	64,31	-	-	-	-	100
	Persentase luasan daerah bebas genangan banjir	%	-	-	-	18,92	20,56	22,19	23,83	-	17,95	18,75	20,62	22,04	-	94,87	91,2	92,92	92,49	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase sungai dalam kondisi baik	%	-	-	-	52,24	52,28	52,32	52,36	-	52,21	52,29	52,3	52,36	-	99,94	100,02	99,96	100	-
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	%	-	-	-	-	-	-	-	52,37	-	-	-	-	52,37	-	-	-	-	100
	Sasaran 2																			
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	-	-	-	73,5	75,25	77	78,75	-	73,06	74,34	77,19	80,27	-	99,4	98,78	100,25	101,93	-
	Persentase keterwujudan penataan ruang	%	-	-	-	-	-	-	-	61,57	-	-	-		61,57	-	-	-		100
	Program																			
	Persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekom Gub	%	-	-	-	40	60	80	100	-	33	50,14		-	-	82,5	83,57			-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun	%	-	-	-	13,34	20,01	26,68	33,35	-	6,67	8,65		-	-	50	43,23		-	-
	Persentase dokumen/arahan pengembangan kewilayahan yang disusun	%	-	-	-	-	-	21,98	21,99	-	-	-	21,98	45	-	-	-	100	204,64	-
	Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	%						60,14	77,29				71,51	107,22				118,91	138,72	
	Persentase Ketersediaan Rencana Tata Ruang	%	-	-	-	-	-	-	-	60,71	-	-	-	-	62,86	-	-	-	-	103,54
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	-	-	-	73	74,5	76	77,5	-	72,6	73,67	76,7	78,9	-	99,45	98,89	100,92	101,81	-
	Persentase Tertib Ruang	%	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	56	-	-	-	-	100
	Persentase Implementasi Indikasi Program	%	-	-	-	73,53	76	78	80		73,53	75	77,68	81,64		100	98,68	99,59	102,05	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pemanfaatan Ruang																			
	Persentase implementasi pemanfaatan ruang	**%**								**68**					**68**					**100**

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 di atas dapat diketahui bahwa persentase pelayanan yang dilakukan oleh dinas tidak mengalami perbedaan gap yang terlalu signifikan, hanya beberapa indikator kinerja ada **Program Penyelenggaraan Jalan** yaitu pada indikator kinerja **Persentase Database Jalan, Jembatan, dan Keciptakaryaan Yang Termutakhirkan** pada tahun 2020 turun menjadi 33,33% dan pada indikator kinerja **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kebinamargaan** pada tahun 2020 mencapai 98,34% mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 59,86% yang terjadi sebagai imbas dari adanya pandemi, kemudian pada tahun setelahnya mengalami peningkatan kembali sebagai upaya peningkatan kapasitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penyelenggaraan Penataan Ruang terdapat perubahan indikator pada Renstra 2018-2023 dengan Renstra 2024-2026 antara lain, Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 84,5% berubah menjadi Indeks Kinerja Sistem Irigasi dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 69,11 (angka); Persentase pemenuhan kebutuhan air baku dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 65,8% berubah menjadi Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 64,31%; Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 77,29% berubah menjadi Persentase Ketersediaan Rencana Tata Ruang dengan realisasi Tahun 2024 sebesar

60,71%; Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 77,5% berubah menjadi Persentase Tertib Ruang dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 56%; Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 80% berubah menjadi Persentase implementasi pemanfaatan ruang dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 68%. Gab angka realisasi selain diakibatkan oleh perbedaan indikator juga diakibatkan perbedaan formulasi dalam menghitung target/realisasi.

Hampir seluruh indikator kinerja pelayanan Dinas PUBMCK dan Dinas PUSDATARU mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua OPD berupaya untuk meningkatan kualitas pelayanan dan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 2.22. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp. 000)					APBD pada Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	7	9	10	11	12	12	14	15	16	17	17
1	Pendapatan	5.500.000	6.000.000	6.538.650	9.325.000	9.400.000	3.864.832	6.000.000	6.600.385	9.325.000	9.400.000	5.927.519	7.377.003	8.309.214	11.182.697	15.120.087
2	Belanja	1.073.124.250	1.236.381.914	1.378.537.146	1.079.962.125	915.759.764	380.899.052	735.394.981	791.634.584	777.117.959	629.735.374	371.340.182	713.738.265	734.576.374	750.774.125	616.710.345
3	Pembiayaan															

No.	Uraian	Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	19	20	21	22	22	23	24
1	Pendapatan	153,37	122,95	125,89	119,92	160,85	1.107.033,60	1.838.513,60
2	Belanja	97,49	97,06	92,79	96,61	97,93	49.767.264,40	49.074.032,60
3	Pembiayaan							

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	-	-	-	-	-	3.631.421	23.879.778	4.715.000	5.298.614	5.343.614	3.129.308	24.532.150	4.341.882	5.050.000	4.713.242,37
2	Belanja	263.870.972	279.959.773	297.195.082	319.621.840	314.097.012	142.823.696	191.705.931	236.849.533	261.297.291	213.214.978	130.508.424	180.660.084	221.972.946	250.000.000	208.056.743,64
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	86,17	102,73	92,09	95,31	88,2	0,080	0,085
2	Belanja	91,38	94,24	93,72	95,68	97,58%	0,083	0,098
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-

Realisasi Pendapatan selama 5 tahun Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, hanya pada tahun 2021 yang dapat melebihi 100%. Sedangkan realisasi belanja masih di bawah 100% tapi masih di atas 90%, dimana deviasi negatif realisasi anggaran dikarenakan adanya sisa tender. Rata-rata pertumbuhan anggaran selama 5 tahun sebesar 0,083% dan rata-rata pertumbuhan realisasi selama 5 tahun sebesar 0,098%.

Dalam tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan OPD dari tahun 2020 sampai dengan 2024 di atas, dapat diketahui bahwa rasio realisasi dan anggaran pendapatan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung ke arah positif untuk pertumbuhannya, dengan realisasi pendapatan terendah di tahun 2019 di angka 119,92% dan realisasi tertinggi pada tahun 2024 di angka 160,85%. Sedangkan untuk rasio realisasi dan anggaran belanja dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan rasio terendah pada tahun 2022 di angka 92,79%. Factor pandemic pada tahun 2020 dan 2021 mempengaruhi alokasi anggaran pendapatan dan belanja pada lingkup pendanaan sehingga berpengaruh pada pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, karena berkaitan dengan operasional pelayanan peralatan dan sumber daya manusia serta progress pelaksanaan program yang dilakukan oleh dinas selama tahun-tahun terdampak.

Dalam Rencana Strategis ini diproyeksikan untuk alokasi pendanaan dalam perencanaan penganggaran selama periode tahun 2025 sampai dengan 2029 untuk dapat menyesuaikan dengan program, kegiatan maupu sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang disepakati dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 ini.

2.3.6. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar lingkup Provinsi, yang terdiri dari :

1. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota.

Dengan mutu Pelayanan Dasar, yang terdiri dari :

1. Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Mutu pelayanan dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Penerima Pelayanan Dasar, yang terdiri dari :

1. Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota;
2. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Tabel 2.24. Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2020 (%)	TARGET 2021 (%)	TARGET 2022 (%)	REALISASI 2020 (%)	REALISASI 2021 (%)	REALISASI 2022 (%)	CAPAIAN 2020 (%)	CAPAIAN 2021 (%)	CAPAIAN 2022 (%)	CAPAIAN 2023 (%)	CAPAIAN 2024 (%)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum curah lintas kabupaten / kota	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh curah lintas Kabupaten/ Kota	100 % (1.500 lt/dt = 120.000 Sambungan Rumah)	100 % (1.500 lt/dt = 120.000 Sambungan Rumah)	100 % (1.500 lt/dt = 120.000 Sambungan Rumah)	100 % (1.500 lt/dt = 120.000 Sambungan Rumah)	100 % (1.500 lt/dt = 120.000 Sambungan Rumah	100 % (1.500 lt/dt = 120.000 Sambungan Rumah	100 %	100 %	100 %	100%	99,99%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2020 (%)	TARGET 2021 (%)	TARGET 2022 (%)	REALISASI 2020 (%)	REALISASI 2021 (%)	REALISASI 2022 (%)	CAPAIAN 2020 (%)	CAPAIAN 2021 (%)	CAPAIAN 2022 (%)	CAPAIAN 2023 (%)	CAPAIAN 2024 (%)
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten / kota	Presentase jumlah masyarakat/ rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Tidak ada target dan rencana kegiatan SPALD Regional)	NA (Proses DED)	NA (Proses Pematangan Lahan IPLT Banjarnegara - Purbalingga)

2.3.7. Evaluasi Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dinas PU BMCK menyelenggarakan urusan pekerjaan umum.

Tabel 2.25. Indikator Kinerja Kunci Penyelenggara Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

No	Urusan			IKK Output		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Definisi Operasional
1.	Pekerjaan Umum	10			10	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	1.073	100,00 %	PU BMCK	• Air minum curah adalah air minum hasil olahan sistem penyediaan air minum atau SPAM lintas kabupaten/kota. Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota yang menjadi kewajiban Pemda Provinsi adalah kebutuhan terhadap pemenuhan air minum curah melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang penyediaan layanannya dilakukan oleh pelaksana penyelenggara SPAM berbasis institusi dengan bentuk kelembagaan BUMD dan/atau UPTD. • Perhitungan kebutuhan pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota didasarkan pada proyeksi kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan di Provinsi tersebut. • Daerah yang tidak memiliki SPAM lintas Kab/Kota untuk melayani penyaluran Air Minum harus menyertakan surat keterangan

No	Urusan			IKK Output		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Definisi Operasional
												beserta penjelasannya, dengan pengisian pada SI LPPD 0/1.
								Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.	1.073			● Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
		11			11	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik/Regional	0	0,00%	PU BMCK	● Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik
												● Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
												● Daerah yang tidak memiliki SPAL Domestik Reagional untuk melayani Pengolahan Air
												Limbah Domestik harus menyertakan surat keterangan beserta penjelasannya dengan pengisian pada SI LPPD 0/1.
								Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik/	0			● Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
								Regional				
					12	Rasio kemantapan jalan	%	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	2.231,73	91,46%	PU BMCK	● Untuk mengukur perhitungan tingkat kemantapan jalan meliputi panjang jalan dan jembatan.

No	Urusan			IKK Output		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Definisi Operasional
												● Kemantapan jalan adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang
								Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi	2.440,12			● Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
		13			13	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di	800 KK	91,63%	PU BMCK	● Tenaga kerja konstruksi yang terlatih adalah tenaga ahli di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
								wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli				● Sertifikat pelatihan ahli termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
												● Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
								Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	873 SKK			
					7	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (ha)	8.149 Ha	22,96%	PUSDATARU	Pembilang :
												> Akumulasi dari luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (perkuatan tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lainlain) yang ditetapkan melalui RTRW Provinsi, Peta Rawan Bencana Banjir dan pada kawasan Permukiman yang terlindungi oleh

No	Urusan			IKK Output		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Definisi Operasional
												infrastruktur pengendalian banjir (Sebagai pedoman dapat dilihat peta tentang pemukiman rawan banjir provinsi).
								Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (ha)	35.488 Ha			Jumlah keseluruhan luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui RTRW Provinsi dan Peta Rawan Bencana Banjir pada kawasan Permukiman (Sebagai pedoman dapat dilihat peta tentang pemukiman rawan banjir provinsi) merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
					8	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	%	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai di wilayah sungai kewenangan Provinsi (ha)	0,55 Ha	2,16%	PUSDATARU	Jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Provinsi sampai dengan tahun pelaporan. > Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Provinsi.
								Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Provinsi (ha)	25,49 Ha			Jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Provinsi sampai dengan tahun pelaporan.
					9	Rasio luas daerah irigasi kewenangan	%	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha),	86.865 Ha	100%	PUSDATARU	Akumulasi dari luas jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha).

No	Urusan			IKK Output		IKK Outcome	Satuan	Rumus	Elemen Data	Capaian	Sumber Data	Definisi Operasional
						provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi		ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting				
								luas daerah irigasi kewenangan provinsi	86.865 Ha			Jumlah keseluruhan luas irigasi kewenangan provinsi pada tahun pelaporan merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan penetapan status daerah irigasi (Norma Standar Prosedur dan Kriteria/NSPK).

2.3.8. Inovasi dan Prestasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Dalam lima tahun terakhir, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya untuk meraih prestasi dan menciptakan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan urusan pekerjaan umum kepada masyarakat. Di bawah ini terdapat beberapa prestasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya antara laim:

a. Pencapaian Kinerja Terbaik Peringkat Pertama Tingkat Nasional Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga (Penghargaan Jalan dan Jembatan) Tahun 2007;

b. Pencapaian Kinerja Terbaik Peringkat Pertama Tingkat Nasional Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga (Penghargaan Jalan dan Jembatan) Tahun 2008;

c. Pencapaian Kinerja Terbaik Peringkat Pertama Tingkat Nasional Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga (Penghargaan Jalan dan Jembatan) Tahun 2009;

d. Penghargaan Khusus Tingkat Nasional Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga Tahun 2010;

e. Terbaik I Kategori Provinsi, Sub Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2014.

f. Penghargaan Kategori Menuju Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.

g. Top 20 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – Inovasi Jalan Cantik.

h. Penghargaan Kategori Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.

i. Terbaik I Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kebinamargaan untuk penyelenggaraan Jalan Provinsi dalam Rangka Hari Jalan Tahun 2022 dari Kementerian PUPR;

j. Terbaik I Nasional Kategori Kinerja Mendukung Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun 2022;

k. Top 5 Tahun 2022 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Dengan Inovasi Pengelolaan Dan Sewa Alat Berat (Wa Albar) Untuk Penguatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

l. Tahun 2022 10 Besar OPD Informatif Organisasi Perangkat Daerah Masuk Dalam Kategori Informatif Di Provinsi Jawa Tengah

m. Peringkat 1 Organisasi Perangkat Daerah Yang Membidangi Sub-Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Terbaik Tahun 2023;

Gambar 2.16 Penghargaan DPU BMCK Jateng pada Kategori Informatif 2020

n. Penghargaan Kategori Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

Gambar 2.17 Penghargaan DPU BMCK Jateng pada Kategori Informatif 2021

o. Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – Inovasi Jalan Cantik dan SILAKON BANGJALI.

Gambar 2.18 DPU BMCK Jateng Menerima Penghargaan Top 10 KIPP

p. Penghargaan Kategori Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.

Gambar 2.19 Penghargaan DPU BMCK pada Kategori Informatif 2022

q. Penghargaan Jasa Konstruksi Tahun 2022, Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Terbaik.

Gambar 2.20 DPU BMCK Jateng Menerima Penghargaan Jasa Konstruksi Tahun 2022

r. Juara 1 Kategori Pemerintah Provinsi "Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kebinamargaan untuk Penyelenggaraan Jalan Dalam Rangka Hari Jalan Tahun 2022" dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gambar 2.21 DPU BMCK Jateng Juara I dalam Penilaian Kinerja

s. Peringkat 1 Organisasi Perangkat Daerah Yang Membidangi Sub-Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Terbaik Tahun 2023

2.3.9. Inovasi dan Prestasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Dalam enam tahun terakhir, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya untuk meraih prestasi dan menciptakan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan urusan pekerjaan umum kepada masyarakat. Di bawah ini terdapat beberapa prestasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang antara lain:

a. Aplikasi **APEMASI** (Alokasi Pembagian Air Irigasi) sebagai salah satu kategori ***Awarding Top 99* tahun 2019** diberikan oleh Kementrian PAN-RB. Aplikasi tersebut dapat diakses lewat HP Android, memberikan informasi yang transparan mengenai distribusi air irigasi dan proses pelaporan menjadi lebih sederhana dengan penggunaan teknologi informasi.

b. **KIP Award Jawa Tengah 2021** dengan kategori Penghargaan Badan Publik Informatif dan Penghargaan Khusus Satya Tinarbuka oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

c. Penghargaan Tingkat Provinsi Tahun 2023, **Peringkat 1 Kategori OPD Provinsi Jawa Tengah dengan tata kelola system pengadaan barang/ jasa terbaik 2023**.

Selain prestasi yang diraih oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, juga membuat inovasi-inovasi yang dapat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menerima pelayanan urusan pekerjaan umum, antara lain:

a. KLIK BINMARCIPKA

Klik Binmarcipka adalah aplikasi aduan masyarakat terkait pembangunan kebinamargaan dan keciptakaryaan. Aplikasi ini mengintegrasikan semua isu kebinamargaan dan keciptakaryaan yang berada di wilayah Jawa Tengah. Klik Binmarcipka merupakan layanan satu pintu yang menghubungkan pada 13 layanan publik, seperti lan Cantik, WebGIS Jalan, Simanis Cika (Sistem Informasi Air Minum Dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah), Mas Petruk (Informasi Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi), Silakon Bangjali (Sistem Layanan Laboratorium Konstruksi Bangunan Gedung, Jalan dan Lingkungan), dan Sibangun Keren (Sistem Informasi Bangunan Gedung). Aplikasi ini dapat diunduh melalui *play store* serta dapat ditemui pada *website* milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.22 Launching Klik Binmarcipka

Sumber: https://jatengprov.go.id/publik/klik-binmarcipka-isu-jalan-gedung-jembatan-hingga-air-minum-dalam-satu-genggaman/

b. *DASHBOARD* SATU DATA PENYELENGGARAAN JALAN

Dashboard satu data penyelenggaraan jalan dapat dijumpai pada *website* https://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/. Pada laman ini, masyarakat dapat mengetahui data kondisi jalan sejak tahun 2017 sampai saat ini. *Dashboard* penyelenggaraan jalan juga menyajikan rekap data jalan yang berlubang dan presentase jalan dengan kondisi baik.

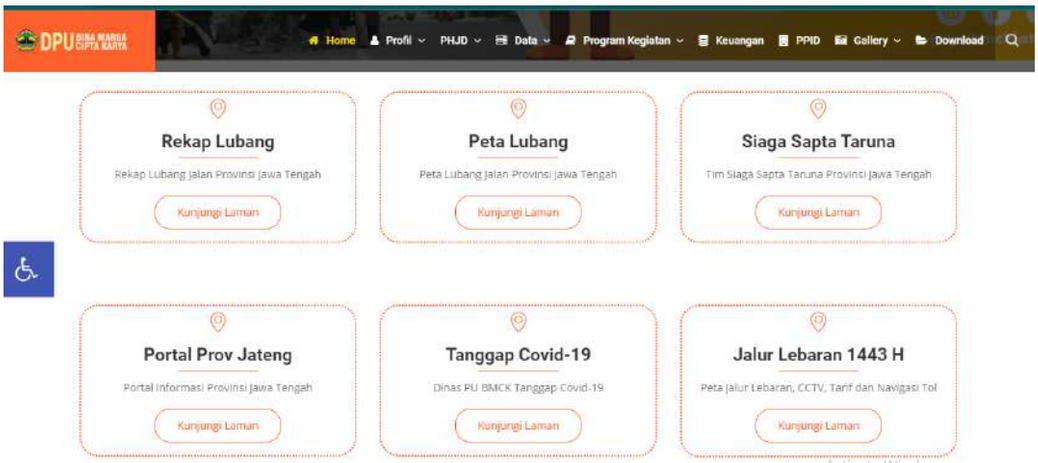

Gambar 2.23 *Interface* Dashboard Satu Data Penyelenggaraan Jalan

Sumber: https://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/

c. JALAN CANTIK

Jalan cantik adalah aplikasi yang berfungsi untuk melaporkan kerusakan jalan dan jembatan yang berada di wilayah provinsi jawa tengah. Aplikasi Jalan Cantik di bangun oleh DPU Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat jawa tengah melalui aplikasi tersebut. Anda bisa melaporkan situasi kerusakan jalan atau jembatan yang anda lihat melalui aplikasi yang tersedia di *play store.* Laporan masyarakat dapat terpantau secara langsung melalui aplikasi dari proses pengerjaan sampai selesai.

Gambar 2.24 *Interface* Jalan Cantik

Sumber:https://jalancantik.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/download-apps

d. SIMANIS CIKA

Simanis Cika merupakan sistem informasi terkait air minum dan sanitasi publik yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya. Simanis Cika memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi air minum, air limbah domestik, persampahan, daerah rawan air dan air baku, serta SPAM JP.

Simanis Cika dapat dikunjungi oleh masyarakat melalui *website* http://simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/.

Gambar 2.25 Interface Simanis Cika

Sumber: http://simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/.

e. SIBANGUN KEREN

Sibangun Keren adalah sistem informasi bangunan gedung yang diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya pada tahun 2022. Sibangun Keren memberikan informasi kepada masyarakat terkait bangunan bersejarah, kinerja bangunan, data gedung di Jawa Tengah. Selain memberikan informasi, Sibangun Keren juga memberikan bantuan teknis kepada masyarakat pada penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara (BGN) dari tahap perencanaan sampai monitoring dan evaluasi.

Gambar 2.26 *Interface* Sibangun Keren

f. MAS PETRUK

Mas Petruk merupakan sistem informasi mengenai pasar kontruksi. Sistem ini memuat berita jasa kontruksi, harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan konstruksi, standar harga satuan tertinggi, serta badan usaha di bidang konstruksi.

Gambar 2.27 Interface Mas Petruk

Sumber: http://maspetruk.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/

g. SILAKON BANGJALI

Silakon Bangjali merupakan Sistem Layanan Laboratorium Konstruksi Bangunan Gedung, Jalan dan Lingkungan. Aplikasi ini ditujukan untuk mempermudah pengujian konstruksi bangunan, gedung, jalan dan lingkungan di Jawa Tengah. Melalui aplikasi ini, layanan diberikan secara akuntabel sehingga mencegah praktik korupsi. Layanan ini, bisa diakses baik melalui peramban di komputer maupun telepon genggam, pada : https://silakon.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/.

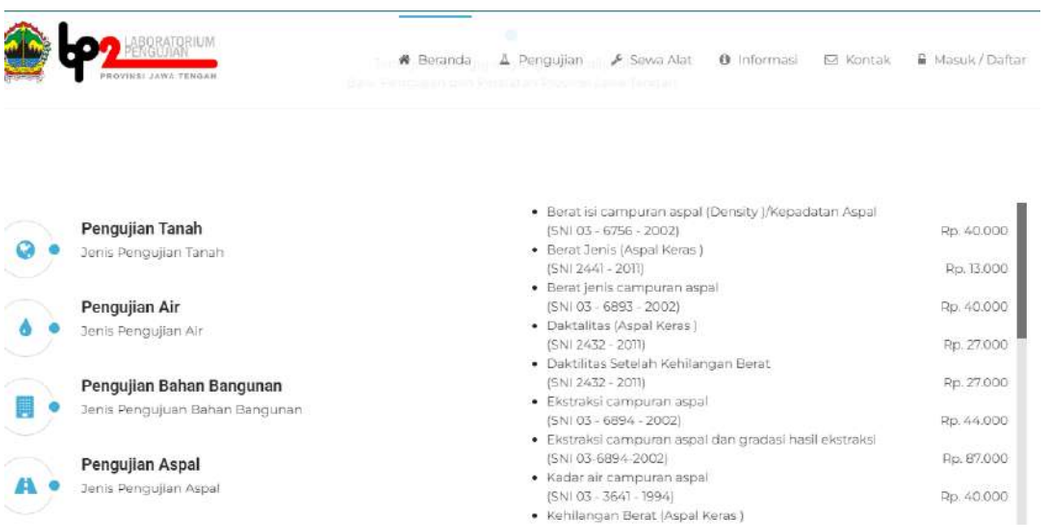

Gambar 2.28 *Interface* Silakon Bangjali

Sumber: https://silakon.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/

h. WA ALBAR

Wa Albar merupakan *platform* penyewaan alat berat seperti *ColdMilling, Excavator, Bulldozer, Grader, Loader, Truck, Vibro, Crane, Shef Leoder, Finisher, Tire Roller, Dump Truck, Truck trailer* dan lain sebagainya. Alat berat ini langsun disewakan oleh Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Provinsi Jawa Tengah. Di dalam aplikasi ini tertera daftar harga penyewaan alat berat dengan berbagai tipe sehingga sangat memudahkan masyarakat untuk memilih alat berat sesuai kebutuhan. Layanan ini dapat ditemukan masyarakat pada *website* https://albar.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/.

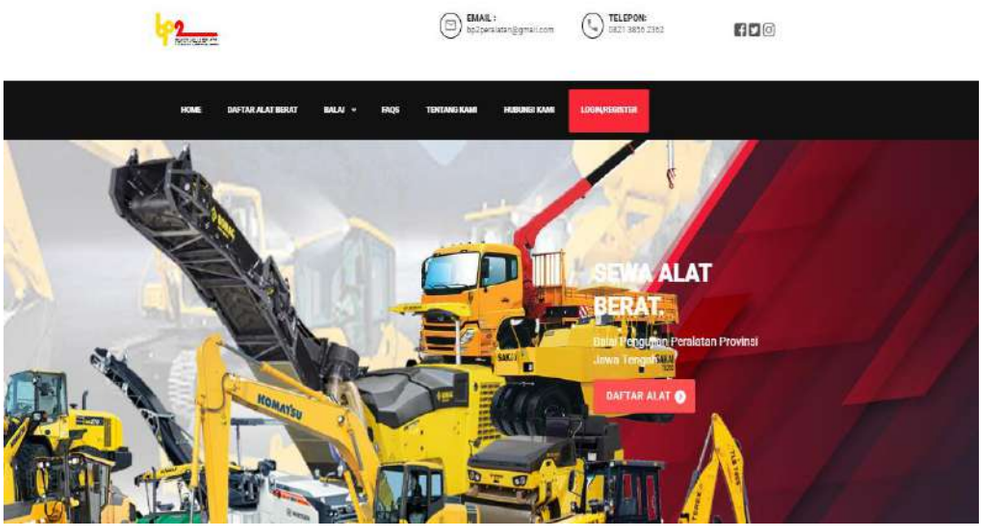

Gambar 2.29 *Interface* Wa Albar

Sumber: https://albar.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/

i. SIP MASSE

SipMasse adalah sistem informasi terkait optimasi asset. Masyarakat dapat menjumpai SipMasse pada *website* https://sipmasse.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/.

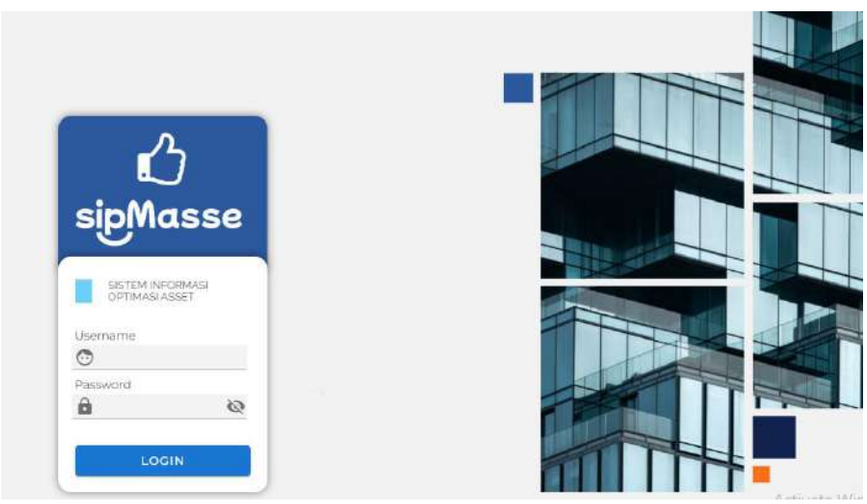

Gambar 2.30 *Interface* Sip Masse

Sumber: https://sipmasse.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/

j. GERAAM

Geraam merupakan layanan pengaduan masyarakat terkait jalan rusak atau tergenang. Aplikasi ini dapat diunduh melalui *playstore*. Melalui aplikasi ini, masyarakat juga dapat mengetahui titik lokasi pengaduan terkait jalan rusak dan tergenang.

Gambar 2.31 *Interface* GERAAM

Sumber: https://geraam.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/

k. CINTA LAPANGAN

Cinta Lapangan adalah sistem informasi yang bertujuan sebagai alat presensi pekerja lapangan. Platform ini membantu meningkatkan efisiensi kinerja pekerja lapangan sehingga dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Platform Cinta Lapangan dapat dijumpai pada website http://cintalapangan.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/.

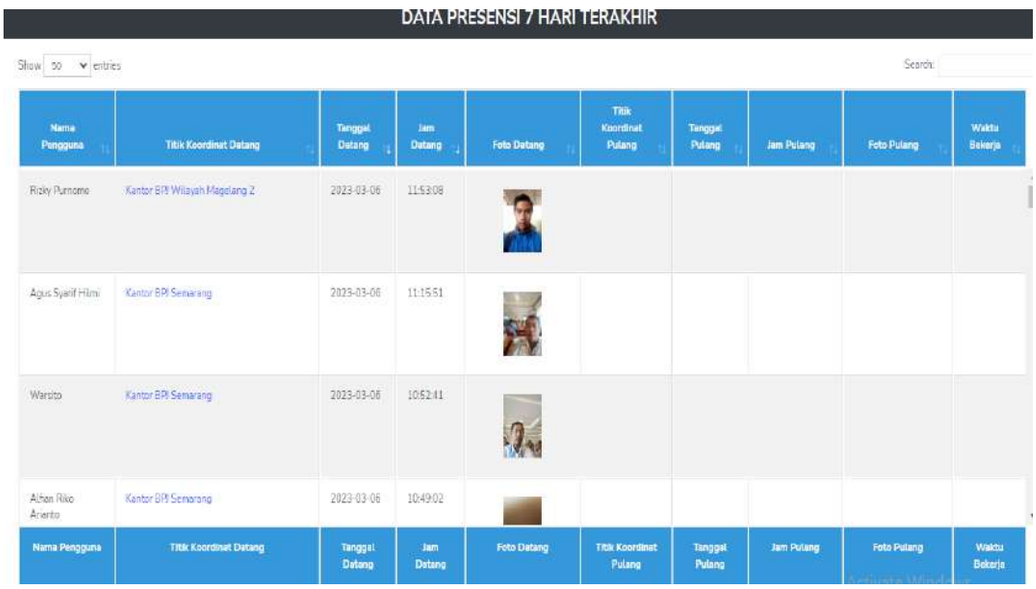

Gambar 2.32 Interface Cinta Lapangan

Sumber: http://cintalapangan.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/.

l. RAMPUNG BAYAR

Rampung Bayar merupakan sistem informasi keuangan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Melalui sistem informasi ini, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana *progress* dari paket pekerjaan yang sedang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Sistem informasi ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan membangun kepercayaan publik.

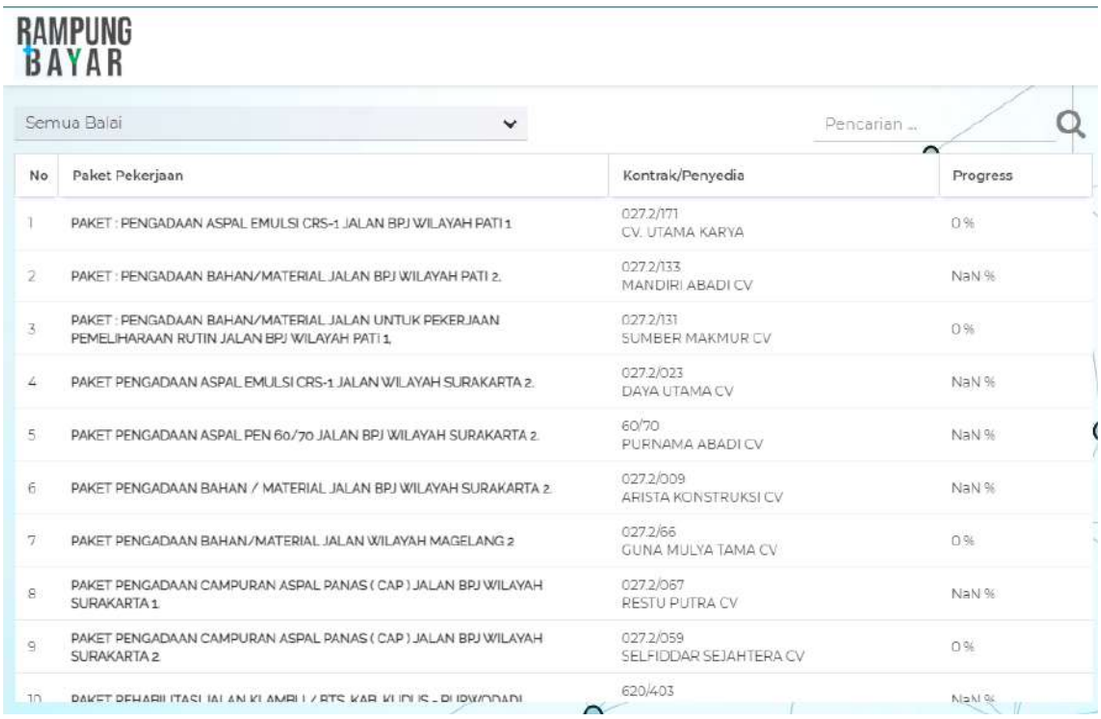

Gambar 2.33 Interface Rampung Bayar

Sumber: https://rampungbayar.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/

m. SIPAPA BRO

Si Papa Bro merupakan Sistem Informasi Pelaporan dan Penanganan Banjir Online. Aplikasi ini menggunakan system android yang dapat didownload pada Google Play bit.ly/sipapabro

Gambar 2.34 Interface Si-Papa Bro
Sumber: https://sipapa.pusdataru.jatengprov.go.id/

n. SIPPP SADAR

Sippp sadar adalah Sistem Integrasi Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Penggunaan Sumber Daya Air yang bermanfaat untuk memoonitoring penggunaan dan pemanfaatan asset tanah dan bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

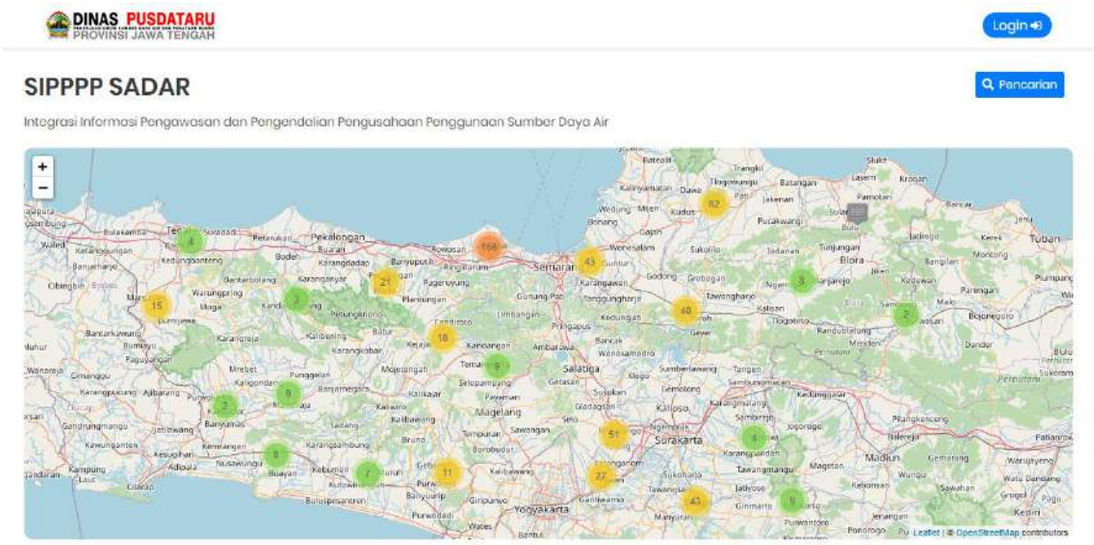

Gambar 2.35 Interface SIPPP SADAR

Sumber: https://pusdataru.jatengprov.go.id/sippppsadar/

o. SIJARI

Sijari merupakan Sistem Informasi Jaringan irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi ini berisi semua informasi terkait jaringan irigasi, untuk kedepannya akan dikembangkan untuk system pelaporan baik permasalahan maupun kondisi terkini.

Gambar 2.36 Interface SIJARI

Sumber: https://sijari.pusdataru.jatengprov.go.id/dashboard/public/

p. DATA BENDUNG DAN WADUK

Data Bendung dan Waduk merupakan system informasi yang berisi data bending control poin dan data ketersediaan air waduk wilayah Jawa Tengah.

Gambar 2.37 Interface Data Bendung dan Waduk
Sumber: https://iab.pusdataru.jatengprov.go.id/bendung_dan_waduk/

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisis SWOT, merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas;
2. Adanya struktur organisasi Balai Pengelolaan Jalan yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk;
3. Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan;
4. Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/pembangunan/penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
5. Pengembangan inovasi-inovasi teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan dilapangan berupa aplikasi Jalan Cantik, Geraam, Silakon Banjali, Simanis Cika, Rampung Bayar, Cinta Lapangan, Dashboard Satu Data Penyelenggaraan Jalan (2021), Sibangun Keren, Walabar, Mas Petruk, Sipmasse;
6. Adanya peningkatan cakupan pelayanan akses air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan;
7. Adanya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat;
8. Adanya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan bersejarah;
9. Banyaknya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah;
10. Banyaknya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan;
11. Adanya penyebarluasan informasi tentang layanan pengujian dan informasi konstruksi.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai;
2. Banyaknya pemanfaatan Rumija yang tidak sesuai keperuntukannya;
3. Kurang optimalnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan;
4. Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor;

5. Masih terdapat ruas Jalan Provinsi yang belum memiliki bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/jembatan terganggu;
6. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun perdesaan;
7. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun perdesaan;
8. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan sebagaimana pedoman teknis yang berlaku;
9. Belum mantapnya koordinasi dalam pelestarian bangunan lama dan pengembangannya serta pengendalian teknis arsitektur jati diri;
10. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi.
11. Belum optimalnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi;
12. Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan;
13. Masih kurangnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi;
14. Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi.

2. Analisis Faktor Exsternal

Analisis faktor eksternal terkait penanganan jalan kewenangan Provinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasikan peluang-peluang (*opportunities*) dan ancaman-ancaman (*threats*) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut :

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
2. Adanya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur, PHJD, Inpres;
3. Adanya peluang pengentasan kemiskinan melalui program padat karya di bidang Kebinamargaan dan Keciptakaryaan;
4. Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
5. Adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa *cold milling*, *rigid pavement* dan beton *pre-cast*;

6. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih;
7. Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah skala Lingkungan/kawasan/Kota;
8. Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat;
9. Meningkatnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan bersejarah;
10. Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah;
11. Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sudah dilengkapi dengan laboratorium uji yang memadai;
12. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi melalui sertifikasi;
13. Sudah tersedia berbagai event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi.

b. Ancaman

1. Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton);
2. Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
3. Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
4. Masih adanya kejadian bencana alam longsor, ambles yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan;
5. Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah provinsi;
6. Kurang termanfaatkannya Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan;
7. Masih adanya ketidaksesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;
8. Masih kurangnya koordinasi dalam pelestarian bangunan bersejarah;
9. Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi;

10. Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai;

11. Berkurangnya penyelenggaraan event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi.

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas dengan alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;

2. Manfaatkan adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/ pemeliharaan, dan peningkatan/ pembangunan/ penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid pavement dan beton pre-cast;

3. Mengoptimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas guna mendukung Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;

4. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan dengan adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;

5. Mengatasi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan di daerah perbatasan antar provinsi dengan memanfaatkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Program Strategis Nasional yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan;

6. Mengoptimalkanpenanganan ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar kolektordengan memanfaatkan alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;

7. Mengatasi pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai peruntukannya dengan menerapkan peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;

8. Mengatasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa *cold milling, rigid pavement* dan beton *pre-cast*;

9. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan dan *over* dimensi (lebih dari MST 8 Ton);

10. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;

11. Mengoptimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas guna menanggulangi masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;

12. Mengoptimalkan adanya struktur organisasi Balai Pengelolaan Jalan yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk untuk mengatasi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata di dalam wilayah provinsi;

13. Menanggulangi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar jalankolektor yang terkait dengan lebar, alinyemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil dan menghindari penggunaan galian Golongan C sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;

14. Mengatasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai untuk menanggulangi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah provinsi;

15. Manfaatkan Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan;

16. Mengoptimalkan penyesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;

17. Mengatasi kurangnya koordinasi dalam pelestarian bangunan bersejarah dan pengembangannya serta pengendalian teknis arsitektur jati diri;

18. Mengatasi kurangnya pelaku jasa konstruksi yang kompeten sehingga terciptanya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;

19. Mengoptimalkan penggunaan peralatan laboratorium uji untuk pengujian mutu bahan dalam kegiatan konstruksi;

20. Mengoptimalkan penyelenggaraan berbagai event di tingkat provinsi atau nasional sebagai media penyebarluasan informasi tentang layanan pengujian dan informasi konstruksi.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

2.5.1. Tantangan

Tantangan Dinas PUPR di Provinsi Jawa Tengah terkait pelayanan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang semakin berat dan kompleks, beberapa tantangan pada masa depan antara lain :

1. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan perekonomian, kebutuhan air semakin meningkat, sementara ketersediaan air cenderung tetap bahkan menurun akibat perubahan tata guna lahan dan perubahan iklim.
2. Menurunnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Intensitas kejadian bencana banjir, rob dan kerusakan pantai akibat cuaca ekstrim dan *land subsidence*.
4. Seluruh infrastruktur yang terbangun harus dipelihara agar tetap berdaya guna untuk meningkatkan nilai manfaat air itu sendiri dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5. Dinamika pembangunan dan pengembangan wilayah, berimplikasi pada penyesuaian pemanfaatan ruang
6. Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, pengelolaan sumber daya air ke depan menuntut tata kelola yang lebih baik, yang melibatkan tidak hanya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan, sumber daya manusia (SDM), namun juga faktor lainnya.

2.5.2. Peluang

1. Tersedianya regulasi tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.
2. Masih adanya potensi sumber daya air yang belum dikelola.
3. Tersedianya Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai se-Jawa Tengah.
4. Potensi dukungan pendanaan dari berbagai sumber yang sah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Infrastruktur jalan merupakan prasarana penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan infrastruktur jalan yang baik mampu mendukung konektivitas antar daerah sehingga tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan perkonomian masyarakat dari kota sampai desa.

Berdasarkan Undang-Undang RI No 02 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 38 tahun 2004 tentang Jalan. Jalan sesuai dengan

peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan Lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.

Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan, masuk dibatasi secara efisien. Jalan kolektor merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

1. Jalan nasional meliputi:
    a. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
        - antarpusat kegiatan nasional;
        - antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/atau
        - pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.
    b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer
    c. Jalan strategis nasional; dan
    d. Jalan Tol.
2. Jalan Provinsi meliputi:
    a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
    b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
    c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

3. Jalan Kabupaten meliputi:
    a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provinsi yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
    b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan: (ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan; ibu kota kabupaten dengan pusat desa; antaribu kota kecamatan; ibu kota kecamatan dengan pusat desa; ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal; antarpusat kegiatan lokal; antardesa; dan poros desa).
    c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
    d. Jalan strategis kabupaten.
4. Jalan kota sebagaimana meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:
    a. antarpusat pelayanan dalam kota;
    b. pusat pelayanan dengan persil;
    c. antarpersil;
    d. antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan
    e. Jalan poros desa dalam wilayah kota

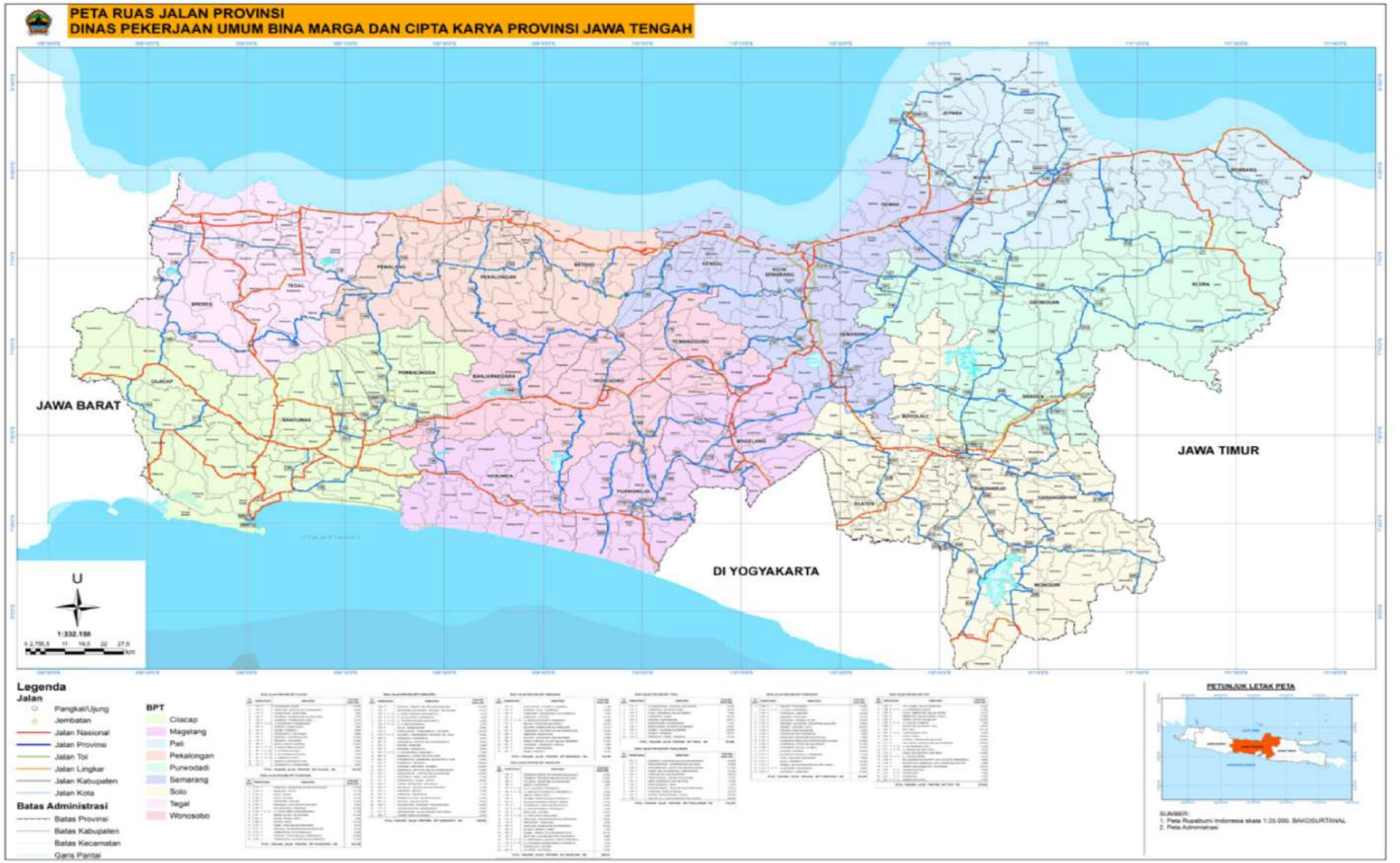

Gambar 2.38 Peta Ruas Jalan Menurut Kewenangan di Provinsi Jawa Tengah

Sistem jaringan jalan dan spesifikasi penyediaan prasarana jalan antara Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada beberapa koridor lintas belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang dipergunakan. Harus diakui bahwa belum tersinerginya Jalan Nasional dan Jalan Sub-Nasional dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan yang berdasarkan pemikiran desentralisasi bidang jalan. Padahal, pada kenyataan di lapangan, seluruh jalan tanpa terkecuali merupakan bagian dari sektor transportasi, jika Jalan Nasional saja yang mantap sementara jalan daerah (Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak mantap, akhirnya biaya transportasi tetap tinggi karena ada bagian dari jalan yang rusak kondisinya.

Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi permasalahan keciptakaryaan antara lain terkait akses air minum dan pengolahan air limbah serta bangunan gedung. Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi layak termasuk di dalamnya aman merupakan salah satu permasalahan dalam memenuhi pelayanan air bersih dan pengolahan air limbah di lingkup provinsi Jawa Tengah. Selain air minum dan air limbah, permasalahan konstruksi juga masih menjadi "pekerjaan rumah" bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, yaitu belum semua bangunan gedung milik daerah dalam kondisi baik. Tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah memastikan kondisi Gedung-gedung miliki Pemerintah Daerah sesuai standart bangunan. Namun masih adanya bangunan-bangunan Gedung yang belum standar yang bisa merugikan masyarakat maupun pegawai lingkup pemerintahan.

Identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah dalam bidang sumber daya air dan penataan ruang yaitu :

1. Masih tingginya intensitas kejadian banjir/rob yang disebabkan karena cuaca ekstrem, keterbatasan infrastruktur pengendali banjir/rob pada sungai dan pantai.
2. Kerusakan DAS akibat erosi, sedimentasi, pengambilan komoditas tambang dan alih fungsi lahan serta rendahnya partisipasi masyarakat terhadap konservasi SDA.
3. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk pertanian, keterbatasan jumlah dan kapasitas tampungan air, serta masih adanya kerusakan dan sedimentasi.
4. Belum optimalnya kinerja jaringan irigasi, masih adanya kerusakan sarpras, kurangnya pengamanan aset, dan rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengguna air.
5. Masih adanya ketidaksesuaian substansi RTRW Kab/Kota terhadap dinamika kebijakan.
6. Rendahnya ketersediaan RDTR kabupaten/kota sebagai acuan pembangunan.
7. Alih fungsi lahan yang disebabkan karena kurangnya pemahaman stakeholders terhadap penyelenggaraan penataan ruang serta kurangnya pengawasan dan penertiban.

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun sebelumnya menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan, tetapi juga masih terdapat beberapa kekurangan sehingga harus dievaluasi kembali. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap – tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor – faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor – faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor – faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Identifikasi dan pemetaan masalah Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kinerja Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah belum terpenuhi	Panjang jalan provinsi yang belum sesuai standar jalan kolektor	Terdapat ruas jalan dengan lebar kurang dari 7 m
			Masih ada ruas jalan yang kualitas strukturnya belum sesuai standar kolektor (MST 8 Ton)
			faktor geografis yang menyebabkan adanya ruas jalan yang berada di daerah dengan potensi rawan longsor, banjir dan tanah labil/bergerak.
			Belum cukupnya ketersediaan lahan yang diperlukan
		Kondisi permukaan jalan belum mantap	Kendaraan yang melintasi jalan melebihi standar Muatan Sumbu Terberat/ ODOL (Over Dimention Over Load)
			Intensitas hujan yang cukup tinggi
			Kurangnya bangunan pelengkap jalan (saluran, bahu jalan, dan dinding penahan tanah)
			Sudah terlampauinya umur rencana jalan
			Masih kurangnya peralatan pendukung pemeliharaan rutin
		Kerusakan Jembatan setiap tahun	Kendaraan yang melintasi jembatan melebihi standar Muatan Sumbu Terberat/ ODOL (Over Dimention Over Load)
			Terdapat jembatan yang berada di daerah alur sungai dengan debit besar, berarus deras

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Sudah terlampauinya umur rencana jembatan
			Terdapat jembatan yang belum sesuai standar dengan lebar kurang dari 7 m
2	Kurangnya ketersediaan air bersih untuk masyarakat	Pengelolaan dan pengembangan SPAM Regional belum sesuai target	Keterbatasan JDU yang belum sampai ke rencana daerah layanan
			Kebocoran pada pipa JDU dan pipa PDAM Offtaker
			Rendahnya minat masyarakat untuk memasang SR (Sambungan Rumah) yang menyebabkan *idle capacity*
			Keterbatasan Kabupaten / Kota yang tidak mempunyai sumber air baku potensial untuk pengembangan/ inisiasi SPAM Regional Jawa Tengah
		Persentase capaian Akses Jaringan Perpipaan masih rendah	Pembinaan teknis kepada KP/BP SPAM belum menyeluruh, karena keterbatasan jumlah peserta Bintek untuk tiap Kabupaten/Kota.
			Pembinaan teknis kepada PDAM Kabupaten/Kota masih belum optimal karena output yang diharapkan belum maksimal
			Adanya desa didaerah dengan Kemiskinan Ekstrim (PKE) di Jawa Tengah yang memerlukan intervensi di bidang Air Minum
3	Kurang optimalnya akses air limbah domestik	Kurangnya pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik regional	Belum adanya penyediaan prasarana sarana air limbah domestik regional
			Kurangnya pembinaan teknis dan pemberdayaan/pengembangan SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah
			Kurangnya pengembangan dan penyediaan prasarana sarana air limbah domestik
4	Masih terdapat penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah dan jasa konstruksi yang belum sesuai standar	Kurang optimalnya hasil penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah dan penyelenggaraan jasa konstruksi	Kurangnya koordinasi teknis dengan SKPD Teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah
			Kurangnya pemahaman terkait aturan bangunan gedung dan jasa konstruksi sesuai standar
			Kurangnya jumlah penyelenggara bangunan gedung milik daerah dan jasa konstruksi yang mendapat pembinaan
			Kurangnya jumlah pelaku jasa konstruksi yang mendapat sertifikat
		Harga satuan pekerjaan konstruksi yang berbeda-beda tiap wilayah	Harga satuan dasar yang dinamis mengikuti perkembangan pasar
5	Tingginya	Menurunnya	1. Terbatasnya sarpras sungai

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	kejadian banjir dan rob	kondisi fisik dan kinerja sungai	2. Ketidaksesuaian pemanfaatan sempadan sungai 3. Kerusakan tanggul sungai 4. Kurang memadainya OP Sungai
		Abrasi pantai	1. Terbatasnya infrastruktur pengaman pantai
		Kerusakan DAS	1. Pengambilan komoditas tambang di sungai 2. Alih fugsi lahan 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam konservasi SDA
		Penurunan permukaan tanah (land subsidence)	1. Eksploitasi air tanah 2. Kondisi geologi batuan 3. Pembebanan berlebih di kawasan pesisir
6	Belum terpenuhinya kebutuhan air baku dan irigasi	Rendahnya kapasitas tampungan air	1. Terbatasnya jumlah tampungan air 2. Kurangnya sebaran tampungan air 3. Sedimentasi dan kerusakan tampungan air
		menurunnya kinerja jaringan irigasi	1. Kerusakan sarpras jaringan 2. belum optimalnya pengamanan aset 3. Rendahnya Kapasitas Kelembagaan (Petugas OP dan Perkumpulan Petani Pemakai Air)
7	Keterwujudan RTR masih rendah	Kurang Relevannya RTR sebagai acuan Pembangunan	1. Ketidaksesuaian substansi RTRW Provinsi terhadap Dinamika Kebijakan 2. Ketidaksesuaian substansi RTRW Kab/Kota terhadap Dinamika Kebijakan dan rendahnya penyusunan RDTR Kab/Kota 3. Tata Ruang belum dapat mengintervensi usulan rencana pembangunan sektoral 4. Tingginya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTR 5. belum adanya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 6. Rendahnya kualitas data geospasial
		Rendahnya pemahaman Sektoral dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Masyarakat terkait penataan	1. Kurangnya pemahaman sektoral dan pemerintah kab/kota terkait penataan ruang 2. kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata ruang

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		ruang	
		Kurangnya pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	1. rendahnya pengawasan penataan ruang 2. rendahnya peran kelembagaan penataan ruang 3. perijinan pemanfaatan ruang belum optimal

2.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

2.7.1 Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 menjadi arah pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, adalah :

" Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045"

Pernyataan visi Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 memiliki makna sebagai berikut :

Maju : Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kontributor perekonomian nasional yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman, dan responsif terhadap lingkungan serta sebagai episentrum lumbung pangan, industri nasional dan magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Nusantara;

Berkelanjutan : Melanjutkan dan meningkatkan Pembangunan Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik, melakukan intergrasi program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, serta melakukan kolaborasi pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Indonesia Emas 2045 : konstribusi Provinsi Jawa tengah sebagai episentrum Pembangunan Sumber daya Manusia nasional menuju bonus demografi pada tahun 2045, yang menjadi sumber inspirasi bagi dunia dengan generasi yang cerdas serta ekonomi yang tumbuh berkembang.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yaitu :

a. Meningkatkan layanan dasar yang Inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;
b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;
c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
e. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadan, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan
f. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pencapaian misi Kepala Daerah :

Ke 1 (satu) : "**Meningkatkan layanan dasar yang Inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global**"

Ke 2 (dua) : **"Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan"**

ke 4 (Empat): **"Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan melalui perencanaan tata ruang yang responsif".**

Untuk mewujudkan misi tersebut, Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinnya berupaya melaksanakan penyelenggaraan jalan provinsi untuk menjaga pelayanan jalan dalam rangka kelancaran arus penumpang dan arus barang dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di sekitar lokasi, serta penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi dan pelatihan tenaga tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Jawa Tengah periode 2025-2029 selain sebagai penjabaran visi dan misi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, juga dilakukan dalam upaya mencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 periode berkenaan. pembangunan daerah Jawa Tengah 2025-2045 diarahkan pada cita-cita **Jawa Tengah maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan**, dengan tetap memperhatikan arah pembangunan nasional untuk Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan rantai nilai industri nasional.

Dari logframe tersebut kemudian diterjemahkan dalam tujuan dan

sasaran daerah tahun 2025- 2029 sebagai berikut:

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah "Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan", dengan indikator kinerja:

a. PDRB per Kapita;
b. Angka Kemiskinan;
c. Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran daerah guna mendukung pencapaian dengan tujuan daerah meliputi:

a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis, dengan indikator kinerja:
    - Indeks Integritas Nasional;
    - Indeks Demokrasi Indonesia;
    - Otonomi Fiskal Daerah;
b. Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
    - Pertumbuhan Ekonomi;
    - Inflasi;
    - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
c. Terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter, dengan indikator kinerja:
    - Indes Modal Manusia;
    - Tingkat Pengangguran Terbuka.

2.7.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan visi dan misi Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini, sudah selayaknya untuk selalu sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional dan Kementerian/Lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu, sangatlah perlu memerhatikan Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) telah memberikan kontribusi yang signifikan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas, penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan produktif, dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional serta peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sasaran Pembangunan Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar Pada Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024,

pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang oleh Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian pembangunan infrastuktur nasional adalah:

Tabel 2.27. Indikator Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian ATR/BPN yang Terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	*Baseline* 2019	Target 2024
1	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	87,8 layak dan 6,7 aman (2018)	100 layak dan 15 aman
2	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20 (2018)	30
3	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	74,6 layak, termasuk 7,42 aman (2018)	90 layak termasuk 15 aman
4	Persentase kondisi mantap jalan Provinsi	68	75
5	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	53,14% (2020)	69,17%
6	Kapasitas tampung per kapita	53,14 m3/kapita (2020)	59,59 m3/kapita
7	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	30.813 m3/tahun/hektar	30.133 m3/tahun/hektar
	Indeks Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	11,02%	9,9%
	Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah	4,25%	8,58%
	Rasio kesesuaian program pembangunan sektor dengan	100%	100%

	RTR nasional dan daerah		
	Rasio Pemenuhan NSPK Bidang Tata Ruang	10%	10%

2.7.3 Implikasi RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044 terhadap Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 08 Tahun 2024 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. Dokumen ini menyempurnakan dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah sebelumnya, disesuaikan dengan perubahan kondisi dan tantangan pembangunan yang baru di Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, RTRW ini juga berfungsi sebagai penunjang penyusunan kembali konsep dan strategi rencana dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkembang sesuai dengan dinamika aktivitas pembangunan dan ketatanegaraan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 akan menjadi landasan krusial yang secara fundamental membentuk dasar Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Implikasi terbesar adalah keharusan DPUPR untuk melakukan sinkronisasi seluruh program, kegiatan, dan anggarannya dalam Renstra 2025-2029 dengan amanat dan ketentuan spasial yang termuat dalam RTRW 2024-2044.

Fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PPR) yang melekat pada Dinas PUPR akan memainkan peran sentral dalam memastikan setiap pembangunan mematuhi rencana pola ruang, terutama pada zona-zona sensitif (Kawasan Lindung, Sempadan Sungai). Renstra 2025-2029 harus memuat program penguatan sistem persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) dan pengawasan. Selain itu perlu dorongan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan-kawasan prioritas (perkotaan dan kawasan pertumbuhan ekonomi) untuk memberikan kepastian investasi dan implementasi RTRW.

Di dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 memuat arahan program yang dituangkan dalam perencanaan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Usulan program utama di dalam indikasi program utama sekurang-kurangnya memuat perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang provinsi, serta mencakup perwujudan kawasan-kawasan strategis provinsi. Arahan pemanfaatan ruang wilayah ruang

Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang provinsi serta kawasan strategis provinsi. Arahan pemanfaatan ruang diprioritaskan untuk mendukung perwujudan struktur tata ruang (yang meliputi pusat kegiatan dan sistem prasarana yang mengikatnya), perwujudan pola ruang, serta perwujudan kawasan strategis provinsi dan kawasan lain di luar kawasan strategis provinsi yang hendak dituju dalam kurun waktu yang sama dengan jangka waktu perencanaan yang dijabarkan secara bertahap dalam waktu 5 tahunan.

Proyek jalan akan difokuskan untuk memperkuat sistem jaringan transportasi primer provinsi yang ditetapkan dalam RTRW, meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menghubungkan simpul-simpul kegiatan (pelabuhan, bandara, kawasan industri) sesuai rencana struktur ruang. Peningkatan jaringan jalan yang mendukung urban-rural *linkages* (keterkaitan desa-kota) serta akses ke KSP Pariwisata dan kawasan lumbung pangan.

Terkait tantangan perubahan iklim, Renstra harus memprioritaskan program pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur SDA yang mendukung konservasi air, pengendalian banjir, dan irigasi berkelanjutan (sesuai arahan pola ruang kawasan lindung dan kawasan pertanian). Pengembangan sistem prasarana pengairan yang terpadu berdasarkan Wilayah Sungai/Daerah Aliran Sungai (DAS) yang diamanatkan RTRW, termasuk pembangunan tampungan air, normalisasi sungai, dan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi.

Untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman, Kegiatan akan diarahkan untuk mendukung kawasan permukiman yang terencana sesuai pola ruang, dengan penekanan pada penyediaan prasarana dasar regional (air minum, persampahan, drainase) yang terpadu dan berkelanjutan. Program sanitasi dan pengelolaan limbah akan disesuaikan dengan kapasitas dan daya dukung lingkungan wilayah yang diidentifikasi dalam RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai perwujudan layanan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, RTRW 2024-2044 berfungsi sebagai kontrak pembangunan spasial Provinsi Jawa Tengah, dan Renstra Dinas PUPR 2025-2029 bertindak sebagai program kerja operasional untuk mewujudkan kontrak tersebut dalam lingkup infrastruktur dan tata ruang, dengan responsif terhadap tantangan era modern.

Tabel 2.28. Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						I	II					III	IV	V
						2024	2025-2029					2030-2034	2035-2039	2040-2044
							2025	2026	2027	2028	2029			
I		PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
	B	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi												
	1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan												
		a. Program penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Arteri Primer												
		- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Arteri Primer	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak,	APBN	Pemerintah Pusat									
		- Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Arteri Primer		APBN	Pemerintah Pusat									
		- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Arteri Primer		APBN	Pemerintah Pusat									
		- Rehabilitasi Jalan Arteri Primer		APBN	Pemerintah Pusat									
		- Rekonstruksi Jalan Arteri Primer		APBN	Pemerintah Pusat									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I	II					III	IV	V
					2024	2025-2029					2030-2034	2035-2039	2040-2044
						2025	2026	2027	2028	2029			
	- Pemeliharaan Rutin Jalan Arteri Primer	Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.	APBN	Pemerintah Pusat								
	- Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer		APBN	Pemerintah Pusat									
	- Pelebaran Jalan Menuju Standar teknis Jalan Arteri Primer		APBN	Pemerintah Pusat									
	b. Program penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer (JKP)												
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo,	▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
			▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Provinsi									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I	II					III	IV	V
					2024	2025-2029					2030-2034	2035-2039	2040-2044
						2025	2026	2027	2028	2029			
		Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.	▪ APBD Kab/ Kota	▪ Pemerintah Kab/ Kota								
	- Pengawasan Penyelenggaraan		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
			▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Provinsi									
			▪ APBD Kab/ Kota	▪ Pemerintah Kab/ Kota									
	- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
			▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Provinsi									
			▪ APBD Kab/ Kota	▪ Pemerintah Kab/ Kota									
	- Rehabilitasi		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
			▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Provinsi									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I	II					III	IV	V
					2024	2025-2029					2030-2034	2035-2039	2040-2044
						2025	2026	2027	2028	2029			
			▪ APBD Kab/ Kota	▪ Pemerintah Kab/ Kota									
	- Rekonstruksi		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
			▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Provinsi									
			▪ APBD Kab/ Kota	▪ Pemerintah Kab/ Kota									
	- Pemeliharaan Rutin		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
			▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Provinsi									
			▪ APBD Kab/ Kota	▪ Pemerintah Kab/ Kota									
	- Pemeliharaan Berkala		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
			▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Provinsi									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I	II					III	IV	V
					2024	2025-2029					2030-2034	2035-2039	2040-2044
						2025	2026	2027	2028	2029			
			▪ APBD Kab/ Kota	▪ Pemerintah Kab/ Kota									
	- Pelebaran Jalan Menuju Standar teknis Jalan Kolektor Primer		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
			▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Provinsi									
			▪ APBD Kab/ Kota	▪ Pemerintah Kab/ Kota									
	- Pembangunan Jalan Kolektor Primer untuk mendukung KSN Kedungsepur.	Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan	▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
			▪ APBD Provinsi	▪ Pemerintah Provinsi									
			▪ APBD Kab/ Kota	▪ Pemerintah Kab/ Kota									
	c. Program penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Tol												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I	II					III	IV	V
					2024	2025-2029					2030-2034	2035-2039	2040-2044
						2025	2026	2027	2028	2029			
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Tol	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.	▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
	- Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Tol		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
			▪ Swasta	▪ Swasta									
	- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
			▪ Swasta	▪ Swasta									
	- Rehabilitasi Jalan Tol		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
			▪ Swasta	▪ Swasta									
	- Rekonstruksi Jalan Tol		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						I	II					III	IV	V
						2024	2025-2029					2030-2034	2035-2039	2040-2044
							2025	2026	2027	2028	2029			
				▪ Swasta	▪ Swasta									
		- Pemeliharaan Rutin Jalan Tol		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
				▪ Swasta	▪ Swasta									
		- Pemeliharaan Berkala Jalan Tol		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
				▪ Swasta	▪ Swasta									
		- Pelebaran Jalan Menuju Standar teknis Jalan Tol		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
				▪ Swasta	▪ Swasta									
		- Program Pengoperasian dan modernisasi Jalan Tol dengan keterangan penerapan *Multi-Lane Free Flow* (MLFF)		▪ APBN	▪ Pemerintah Pusat									
				▪ Swasta	▪ Swasta									
	E	Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I	II					III	IV	V
					2024	2025-2029					2030-2034	2035-2039	2040-2044
						2025	2026	2027	2028	2029			
	1 Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi												
	a. Peningkatan, pengembangan, dan pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat	**Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Pemalang.**	**APBN**	**Pemerintah Pusat**									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					I	II					III	IV	V
					2024	2025-2029					2030-2034	2035-2039	2040-2044
						2025	2026	2027	2028	2029			
	b. Rehabilitasi Daerah Irigasi Glapan	Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak	APBN	Pemerintah Pusat									

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		Waktu Pelaksanaan	
				Utama	Pendukung	2020-2024	2004-2009
	PERWUJUDAN SISTEM TRANSPORTASI						
A.	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan**						
1.	Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Bina Marga	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
	Jalan lingkar Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang – Pekalongan, Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Bumiayu dan Pati;					√	
	Ruas Baru lingkar metropolitan Kedungsepur					√	√
	Ruas Baru metropolitan Subosukawonosraten;						√
	Ruas Baru metropolitan Bregasmalang						√

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		Waktu Pelaksanaan	
				Utama	Pendukung	2020-2024	2004-2009
2.	Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Bina Marga	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
	Pejagan – Ketanggungan, Ketanggungan – Prupuk, Tegal – Slawi – Prupuk – Ajibarang – Purwokerto, Purwokerto – Sokaraja, Sokaraja – Purbalingga, Randu Dongkal – Bobotsari, Purbalingga – Bobotsari, Purbalingga – Klampok, Mandiraja – Gombong, Selokromo-Prembun, Banjarnegara – Wanayasa, Magelang – Salatiga, Boyolali – Klaten, Surakarta – Sukoharjo, Sukoharjo – Wonogiri, Wonogiri – Biting, Prembun – Selokromo, Jati – Purwodadi, Purwodadi – Godong, Surakarta – Purwodadi - Pati, Kudus – Jepara, Boyolali – Blabak, Bumiayu – Randudongkal – Kebonagung – Bawang – Sukorejo – Cangkiran – Ungaran, Weleri – Parakan, Bawang – Dieng, Slawi – Randudongkal, Randudongkal – Moga					√	√
	Perbatasan Jawa Barat – Wangon – Purwokerto - Banyumas – Wonosobo – Secang					√	
	Semarang – Purwodadi – Blora dan Pengembangan ruas jalan Cepu – Blora – Rembang					√	
	Bandungsari – Penanggapan – Perbatasan Jawa Barat, Patimuan – Sidareja – Cilacap, Tawangmangu – Perbatasan Jawa Timur, Klaten – Cawas – Jentir, Sukoharjo – Watukelir, Wonogiri – Pacitan serta Wonogiri – Namengan (Perbatasan Yogyakarta					√	√
	Bawang – Dieng					√	√
	Kebumen – Karangsambung – Banjarnegara					√	√
3.	Pengembangan Jalan Tol		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang		
	Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Demak-Kudus-Pati-Perbatasan Jawa Timur					√	√
	Pengembangan jalan tol sepanjang Solo – Sragen – Perbatasan Jawa Timur					√	
	Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta – Solo					√	

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		Waktu Pelaksanaan	
				Utama	Pendukung	2020-2024	2004-2009
	Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta – Bawen					√	
	Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis – Cilacap – Yogyakarta					√	√
	Pengembangan jalan tol sepanjang Pejagan – Cilacap					√	√
	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LINGKUNGAN		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kab/Kota Terkait Prasarana Limbah Drainase		
A.	**Pengembangan prasarana limbah dan drainase**						
	pembangunan tempat pengolahan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun					√	
	pengembangan sistem drainase terpadu di seluruh ibukota kabupaten/kota					√	
	pengembangan sumur resapan di tiap bangunan					√	

Sumber : Dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

2.7.4 Implikasi KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 Bagi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa tengah memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi TPB/SDGs pada Panca Upaya Utama Pembangunan Provinsi Jawa tengah Tahun 2025-2029. Langkah selanjutnya adalah seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa tengah, termasuk Dinas PUPR Provinsi Jawa tengah, mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.2 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Gambar 3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/ SDGs)

Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan erat terhadap beberapa tujuan dari 17 tujuan TPB/SDGs. Beberapa tujuan tersebut yaitu tujuan 2 **"menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan"** dengan target pada 2030 menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan; tujuan 6 **"Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua"** dengan target pada tahun 2030 melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau; tujuan 9 "**Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri**

Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi "; tujuan 13 **"Membuat langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya"** dengan target Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

Berdasarkan distribusi indikator tanpa upaya tambahan setiap tujuan dan pilar, berikut adalah distribusi indikator-indikator capaian TPB Dinas PUPR Jawa Tengah

Tabel 2.29. Proyeksi Business As Usual (BAU) Capaian Indikator TPB untuk Kelompok Indikator Dengan Upaya Tambahan

No. Indikator	Indikator	Sat.	Base line	Target	Proyeksi					
				Perpres 111/ 2022	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	54,34	100	63,36	65,84	68,32	70,81	73,29	75,77
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3/detik	62	118,6	62,83	63,11	63,39	63,67	63,94	64,22
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan	%	36,93	100	47,63	51,2	54,77	58,34	61,9	65,47

No. Indikator	Indikator	Sat.	Base line	Target Perpres 111/ 2022	Proyeksi					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	berkelanjutan.									
6.2.1 (e)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	kab/kota	3	35	0	3	3	3	3	3
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Wilayah Sungai	7	8	7	7	7	7	7	7

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Tabel 2.30. Analisis Capaian TPB Tahun 2022 terhadap Target Nasional

No. Indikator	Indikator	Sat.	2018	2019	2020	2021	2022	Target Nasional	Status
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	44,41	56,98	55	55,91	54,34	100	Belum Tercapai
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3/detik	60,89	61,8	61,39	61,5	62	118,6	Belum Tercapai
6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air	%	22,66	26,7	32,24	34,06	36,93	100	Belum Tercapai

No. Indikator	Indikator	Sat.	2018	2019	2020	2021	2022	Target Nasional	Status
	minum aman dan berkelanjutan.								
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Kab/ Kota	8	8	3	-	-	35	Belum Tercapai
6.4.1 (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Kebijakan	NA	NA	NA	NA	NA	ada	
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Wilayah Sungai	7	7	7	7		8	Belum Tercapai
6.5.1 (g)	Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Lembaga	4	4	4	4		ada	Tercapai
9.1.1 (b)	Panjang pembangunan jalan tol	Km	302,21	359,8	359,8			Naik	Tercapai

Tabel 2.31. Rekomendasi Target, Program dan Anggaran Indikator Dengan Upaya Tambahan untuk Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

No. Indikator	Indikator	Sat.	Basel line	Target Perpres 111/ 2022	Proyeksi				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	54,34	100	73,03	78,74	84,45	90,16	95,86

No. Indikator	Indikator	Sat.	Baseline	Target Perpres 111/ 2022	Proyeksi				
					2025	2026	2027	2028	2029
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3/ detik	62	118,6	83,23	90,30	97,38	104,45	111,53
6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	100	36,93	60,58	68,47	76,35	84,23	92,12
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbanguninfrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Kab/ Kota	3	35	19	22	25	29	32
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Wilayah Sungai	7	8	7	8	8	8	8

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

2.7.5 Penentuan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah

Meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di provinsi jawa tengah, membuat semakin tinggi dan dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi jawa tengah secara regional dan nasional.

Penyediaan air baku saat ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan terkait kuantitas dan kualitas air. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menuntut ketersediaan air yang terus meningkat. Ketersediaan air baku melalui sumber permukaan yang terbatas, menyebabkan pemanfaatan air tanah yang berlebihan di beberapa wilayah. Pemanfaatan yang berlebihan ini akhirnya berimplikasi pada menurunnya muka air tanah dan intrusi air laut di beberapa wilayah pesisir.

Di sisi lain, sumber-sumber air permukaan juga dihadapkan pada isu sedimentasi yang tidak hanya mempengaruhi kuantitas, tapi juga kualitas air. Sedimentasi dipengaruhi oleh perubahan (alih fungsi) lahan terutama di daerah hulu. Selain sedimentasi, kualitas air di berbagai sumber air juga dipengaruhi oleh pencemaran yang bersumber dari berbagai kegiatan masyarakat.

Pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air baku di Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas air permukaan yang cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan perubahan iklim global, terjadinya degradasi Daerah Tangkapan Air (DTA), adanya perubahan tata guna lahan dan limbah cair maupun padat yang berasal dari permukiman atau industri yang berpotensi mengurangi kualitas air.

Di sisi lain, sungai yang merupakan aliran terbuka dari air permukaan cenderung mengalami penurunan kondisi fisiknya, disebabkan tingginya laju sedimentasi akibat erosi lahan budidaya sehingga kapasitas alir sungai menjadi berkurang dan belum sepenuhnya dapat menampung debit air di musim penghujan yang berpotensi menimbulkan genangan banjir.

Penataan Ruang merupakan garda terdepan dalam pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan harus diimplementasikan dalam rencana pembangunan. Permasalahan yang masih terjadi saat ini adalah terkait alih fungsi lahan yang pengendaliannya masih kurang optimal, sehingga diperlukan adanya penguatan kolaborasi dengan semua pemangku kebijakan dalam mencapai tertib ruang untuk meningkatkan keterwujudan penataan ruang.

Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Standarisasi teknis pelayanan minimal jalan kolektor pada jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jawa Tengah;

2. Kelengkapan bangunan pelengkap jalan;
3. Optimalisasi umur rencana jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Akses dan ketersediaan air bersih;
5. Stabilitas jalan dan tanah di ruas jalan kewenangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Inventarisasi pengamanan, dan pemeliharaan asset perangkat daerah;
7. Aspek Konservasi Sumber Daya Air : Berkurangnya tutupan lahan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai serta Menurunnya kualitas air akibat pencemaran limbah domestik dan industri.
8. Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air : Penyediaan air untuk irigasi dan air baku, Penurunan fungsi jaringan irigasi serta kekeringan
9. Aspek Pengendalian Daya Rusak Air : Banjir dan rob, Penambangan galian mineral non logam tanpa ijin di wilayah sungai, Abrasi pantai serta Erosi dan sedimentasi
10. Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang : Belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang, implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang.

Tabel 2.32. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	1	2	3	4	5	6	7
1	Jalan Kewenangan Provinsi Sepanjang 2440,12 Km Jembatan kewenangan Provinsi Sejumlah 2080 jembatan	Kinerja Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah belum terpenuhi	2. Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi masih relatif rendah	9. Infrastruktur	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	• Standarisasi teknis pelayanan minimal jalan kolektor pada jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jawa Tengah; • Kelengkapan bangunan pelengkap jalan; • Optimalisasi umur rencana jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jawa Tengah; • Stabilitas jalan dan tanah di ruas jalan kewenangan Provinsi Jawa Tengah;

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
							• Inventarisasi pengamanan, dan pemeliharaan asset perangkat daerah;
2	Sistem Pengelolaan Air Minum Regional di Jawa Tengah (SPAM Regional Bregas, SPAM Regional Keburejo, dan SPAM Regional Petanglong, SPAM Wososukas	Kurangnya ketersediaan air bersih untuk masyarakat	1. Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2. Belum optimalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.	1. Air bersih dan sanitasi 2. infrastruktur	1.Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Akses dan ketersediaan air bersih

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
3	Wilayah Sungai Pemali Comal dengan potensi ketersediaan air 14,85 milyar m3/thn dan Wilayah Sungai Bodri Kuto dengan potensi ketersediaan air 3,56 milyar m3/thn	Belum terpenuhinya kebutuhan air baku dan irigasi	1. Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup 5. Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim	9. Infrastruktur 12. Perubahan Iklim	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Berkurangnya tutupan lahan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai serta Menurunnya kualitas air akibat pencemaran limbah domestik dan industri.
4	1. 108 DI kewenangan Provinsi Jawa Tengah dengan luas 86.865 Ha 2. 101 unit Embung dan penampung air lainnya dengan kapasitas 2.688.058,55 m3	Belum terpenuhinya kebutuhan air baku dan irigasi	1. Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup 5. Peningkatan intensitas	9. Infrastruktur	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan	2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Penyediaan air untuk irigasi dan air baku, Penurunan fungsi jaringan irigasi serta kekeringan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
			bencana dan ancaman perubahan iklim		belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi		
5	Wilayah Sungai Pemali Comal dengan potensi air 14,85 milyar m3/thn dan Wilayah Sungai Bodri Kuto dengan potensi air 3,56 milyar m3/thn	Tingginya kejadian banjir dan rob	1. Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup 5. Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim	12. perubahan iklim	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi	3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Banjir dan rob, Penambangan galian mineral non logam tanpa ijin di wilayah sungai, Abrasi pantai serta Erosi dan sedimentasi

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
					digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi		
6	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044	Keterwujudan RTR masih rendah	1. Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup 5. Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim	9. Infrastruktur 12. Perubahan Iklim	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang, implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
					terhadap pertumbuhan ekonomi		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Seiring dengan berkembangnya pembangunan daerah yang semakin pesat, penyediaan kapasitas pelayanan infrastruktur urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini sudah seharusnya diikuti dengan pengimplementasian kualitas dan kapasitas infrastruktur dan SDM yang terkini dan terdepan. Sebagai bentuk komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pengelolaan layanan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah menjadi garda terdepan dalam terselenggaranya pelayanan di bidang Kebinamargaan, Pengelolaan Sumber Daya Air, dan keciptakaryaan serta Penyelenggaraan Penataan Ruang. Hal ini sejalan dengan semua kompleksitas isu terkini yang diperbaharui dengan data *real-time* yang lengkap, cepat tersampaikan pada masyarakat luas, dan memiliki informasi yang jelas atau sahih. Dalam hal ini, peran Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat penting sesuai dengan amanat dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pelaksanaan peran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, diimplementasikan dalam perumusan tujuan dan sasaran yang tertuang pada Renstra Dinas PUPR Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dimana visi dan misi Kepala daerah dan RPJMD 2025-2029 yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra.

Dalam dokumen Renstra Jawa Tengah Tahun 2025-2029, memuat konsep yaitu **Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045**.

Maju : Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kontributor perekonomian nasional yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman, dan responsif terhadap lingkungan serta sebagai episentrum lumbung pangan, industri nasional dan magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Nusantara;

Berkelanjutan : Melanjutkan dan meningkatkan Pembangunan Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik, melakukan intergrasi program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, serta melakukan kolaborasi pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Indonesia Emas 2045 : konstribusi Provinsi Jawa tengah sebagai episentrum

Pembangunan Sumber daya Manusia nasional menuju bonus demografi pada tahun 2045, yang menjadi sumber inspirasi bagi dunia dengan generasi yang cerdas serta ekonomi yang tumbuh berkembang.

Adapun gambaran tujuan ke dalam sasaran yang lebih spesifik sekaligus penyelarasannya dengan tujuan dan sasaran Renstra dapat dilihat dalam gambar berikut.

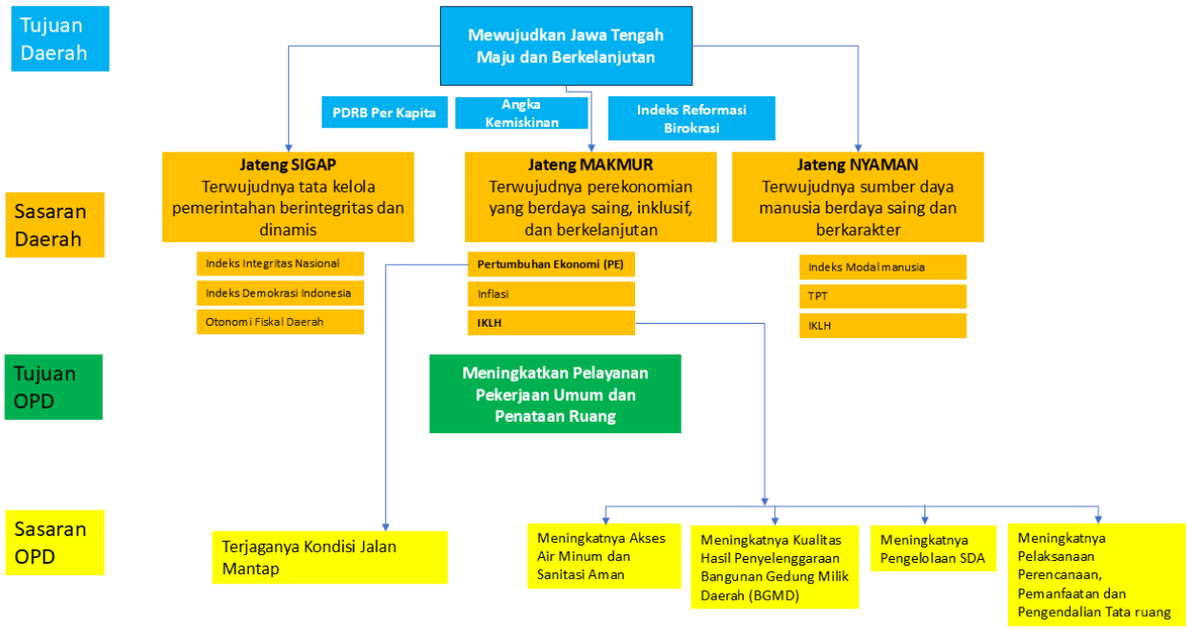

Gambar 3.1 Keselarasan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa tujuan (akhir) yang ingin dicapai dari penyelenggaraan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat tugas dan fungsi bidang urusan Pekerjaan Umum sub urusan Irigasi, air baku, pengelolaan sungai, jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, yaitu Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam mewujudkan tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian dijabarkan ke dalam sasaran sebagai berikut.

1. Terjaganya Kondisi Jalan Mantap;
2. Meningkatnya Akses Air Minum dan Akses Sanitasi Aman;
3. Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD);
4. Meningkatnya Pengelolaan SDA;

5. Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang.

Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, kebinamargaan, keciptakaryaan dan penataan ruang dengan layanan yang akuntabel, partisipatif, dan transparan. Tanggung jawab penting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah pengelolaan opini dan aspirasi publik terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tanggung jawab tersebut diimplementasikan sesuai tugas dan fungsi sebagai peran strategis dinas dalam pengelolaan dan pelayanan infrastruktur daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, kebinamargaan, keciptakaryaan dan penataan ruang yang inklusif, terintegrasi dan kolaboratif guna menopang arus informasi kebijakan kepala daerah yang dapat dirujuk sebagaimana telah dijabarkan pada RPJMD 2025-2029 dan setiap tahun dioperasionalkan dalam RKPD.

Adapun tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PE)												
			Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Mantap	%	N/A	N/A	N/A	48,2	48,4	48,7	49,1	49,5	49,54
		Terjaganya Kondisi Jalan Mantap											

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	N/A	91,5	93,1	93,1	93,3	93,5	93,6	93,8	93,76
			Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	%	N/A	47,1	48,2	48,2	48,4	48,7	49,1	49,5	49,54
			Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap	%	N/A	61,6	63,2	63,2	63,4	63,6	63,7	63,9	63,85

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (IKLH)												
			Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	N/A	N/A	N/A	41,9	47,3	51,5	56,1	59,1	59,05
			Persentase Keterwujudan Penataan Ruang	%	N/A	62,3	56,9	63,7	69,3	74,7	79,5	83,8	83,84
			Persentase Tingkat Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air	%	N/A	66,5	67,4	67,7	67,8	67,9	68,1	68,2	68,19

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang											
			Persentase implementasi pemanfaaatan ruang	%	N/A	68	71,7	75,3	78,9	82,5	86,1	89,7	89,71
			Persentase Tertib Ruang	%	N/A	48	48	55	60	66	70	73	73
			Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	N/A	62,9	51	60,2	69,4	76	82,7	88,6	88,59

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kualitas hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD)											
			Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) Dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar	%	N/A	49,4	61,7	68,1	76	80,8	86,4	89,8	89,81
		Meningkatnya Pengelolaan SDA											

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase Penyediaan Rencana Teknis terhadap Rencana Pembangunan Infrastruktur SDA	%	N/A	61,3	62,5	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7
			Persentase Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air	%	N/A	70,8	71,3	71,4	71,5	71,6	71,7	71,8	71,79
			Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Angka	N/A	67,5	68,5	69	69,2	69,5	69,8	70,1	70,07
		Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Aman											

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	N/A	19,2	36,5	41,2	45,9	50,6	55,3	57,4	57,35
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	N/A	9,72	13,8	17,8	21,9	25,9	30	32,1	32,05

Sehubungan surat Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum no CK 0501-Ca/131 tanggal 12 Juni 2025 perihal penyampaian angka baseline target indikator RPJMN air minum untuk Provinsi Jawa Tengah bahwa untuk baseline Rumah Tangga dengan Akses Air Minum aman tahun 2024 mengalami perubahan dari capaian Provinsi sebesar 40,86% menjadi 19,20%, sehingga ada penyesuaian untuk target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman Renstra 2025-2029.

Tujuan dan Sasaran serta indikator yang berkaitan dengan **kesekretariatan** Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	*Baseline* Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegrasi dan Dinamis di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**		**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**Angka**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	80,02	80,82	81,62	82,42	83,22	**83,22**
	Sasaran 1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Angka	**N/A**	**N/A**	**N/A**	88,80	88,85	88,90	88,95	89,00	**89,00**
	Sasaran 1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Indeks Manajemen Risiko	Angka	**N/A**	**N/A**	**N/A**	2,97	2,99	3,02	3,04	3,07	**3,07**

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Persentase Penyediaan Rencana Teknis terhadap Rencana Pembangunan Infrastruktur SDA**

   Definisi: Persentase realisasi penyediaan dokumen rencana teknis terhadap kebutuhan rencana pembangunan infrastruktur sumber daya air. Dokumen Perencanaan teknis dimaksud adalah dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai.

2. **Persentase Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air**

   Definsi: Persentase rata-rata pengelolaan SDA yaitu, kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik, embung dan penampung air lainnya kewenangan provinsi jawa tengan dalam kondisi baik, realisasi kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya kewenangan provinsi jawa tengah.

3. **Indeks Kinerja Sistem Irigasi**

   Definisi: Merupakan angka dari nilai rata-rata penilaian pembobotan enam komponen indikator kinerja sistem irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Enam komponen tersebut yaitu : kondisi prasarana fisik, produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

4. **Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Mantap**

   Definisi: Persentase jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Permukaan Mantap merupakan pengukuran jalan untuk menentukan persentase jalan sesuai standar kolektor dan dalam kondisi mantap dibandingkan keseluruhan jalan yang menjadi wewenang provinsi Jawa tengah. Adapun perolehan Persentase jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Permukaan Mantap didapat dari survey kondisi jalan PKRMS Dimana yang kondisi permukaan jalan baik dan sedang dan memiliki lebar jalan minimal 7 m

A. Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor

Definisi: Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur jalan yang menjadi wewenang Provinsi Jawa Tengah yang sudah sesuai dengan standar jalan kolektor yaitu memiliki lebar 7 meter dan Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton. Rumus Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor adalah Panjang jalan sesuai standar jalan kolekor dibandingkan keseluruhan jalan wewenang Provinsi Jawa Tengah.

B. Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaaan Mantap

Definisi: Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaaan Mantap merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur jalan menurut Standar Pelayanan Minimal adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang. Rumus Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaaan Mantap adalah Panjang jalan kondisi baik dan sedang dibandingkan keseluruhan jalan wewenang Provinsi Jawa Tengah.

C. Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap

Definisi: Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur jalan menurut Standar Pelayanan Minimal adalah jalan dalam Nilai kerataan jalan baik dan sedang. Rumus Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap adalah Panjang jalan nilai kerataan baik dan sedang dibandingkan keseluruhan jalan wewenang Provinsi Jawa Tengah.

5. Indeks Pelayanan Keciptakaryaan

Definisi: Indeks Pelayanan Keciptakaryaan merupakan pengukuran terhadap capaian 3 sub indikator layanan dasar cipta karya yaitu: 1) Persentase Akses Air Minum Aman; 2) Persentase Akses Air Limbah Domestik Aman; serta 3) Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar. Adapun rumus penghitungan indikator berdasarkan rata-rata realisasi ketiga sub-indikator

A. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman

Definisi: Persentase Akses Air Minum Aman merupakan pengukuran terhadap air minum yang dikonsumsi rumah tangga Jawa tengah dalam keadaan aman. Adapun rumus penghitungan indikator Persentase Akses Air Minum Aman adalah Jumlah rumah tangga yang menggunakan Air Minum Aman dibandingkan keseluruhan jumlah rumah tangga Jawa Tengah.

B. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Definisi: Persentase Akses Air Limbah Domestik Aman merupakan pengukuran terhadap pengolahan air limbah domestik masyarakat Jawa tengah dalam keadaan aman.. Adapun rumus penghitungan indikator Persentase Akses Air Limbah Domestik Aman adalah Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Aman dibandingkan keseluruhan jumlah Rumah Tangga Di Jawa Tengah.

C. Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar

Definisi: Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar merupakan pengukuran terhadap bangunan Gedung Milik Pemerintah daerah dalam kondisi sesuai standart pembangunan. Adapun rumus penghitungan indikator Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar adalah Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar dibandingkan keseluruhan Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) Jawa Tengah.

6. Persentase ketersediaan rencana tata ruang

Definisi: Persentase dari rata-rata persentase ketersediaan dokumen tata ruang dan fasilitasi RTR Kabupaten/ Kota

7. Persentase implementasi pemanfaaatan ruang

Definsisi: Persentase atas pembobotan persentase rekomendasi pemanfaatan ruang dan persentase sinkronisasi program.

8. Persentase Tertib Ruang

Definsisi: akumulasi atas persentase pembobotan pelaksanaan pengawasan penataan ruang dan persentase pembobotan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (IKLH)	Meningkatnya Pengelolaan SDA	Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air	1. Menyusun Pola dan Rencana Pengelolaan SDA 2. Melaksanakan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA
				4. Menyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				5. Menyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
				6. Menyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Perkotaan dan Pengaman Pantai
				7. Melaksanakan Pengelolaan Aset
				8. Mengelola Informasi Pengelolaan SDA
			Meningkatkan Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	1. Membangun Embung dan Penampung Air Lainnya 2. Merehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 3. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
				4. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
				5. Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
				6. Merehabilitasi

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Jaringan Irigasi Permukaan
				7. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				8. Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
			Meningkatkan kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	1. Menyusun Pola dan Rencana Pengelolaan SDA
				2. Mengelola Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Sarana Prasarana SDA, pengelolaan dan peringatan dini banjir
				3. Membangun Bangunan Perkuatan Tebing
				4. Membangun Check Dam
				5. Melaksanakan Normalisasi/Restorasi Sungai
				6. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
				7. Membangun Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
				8. Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
		Meningkatnya Akses Air Minum Aman dan Sanitasi Aman	Peningkatan Akses Air Minum Aman Melalui Akses Jaringan Perpipaan, Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota dan Air	1. Pembangunan JDU SPAM Regional ke daerah layanan;
				2. Peningkatan JDU SPAM Regional;
				3. Bimbingan teknis kepada Kelompok Pengelola SPAM dan sanitasi (KPSPAMS);

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Siap Minum Perpipaan	4. Bimbingan teknis kepada PDAM Kabupaten/Kota;
				5. Pembangunan Desalinasi Air;
				6. Hibah hasil pembangunan SPAM Desa di daerah dengan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
			Peningkatan Akses Sanitasi Aman melalui Pembangunan IPLT Regional, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pembangunan SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) Regional;
				2. Pembinaan teknis dan pendampingan pengembangan SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah;
				3. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Desa (Hibah).
			Peningkatan Akses Sanitasi Aman melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA dan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS Kab/kota	1. Pembangunan TPA/TPST/SPA
				2. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota
		Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD)	Optimalisasi Standar Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi di Provinsi Jawa Tengah	1. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan sosialisasi tekait penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah;
				2. Fasilitasi bantuan teknis pembangunan gedung milik daerah sesuai standar.
			Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jasa Konstruksi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	1. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi.
			Optimalisasi Hasil Penyelenggaraan pada Bangunan Gedung Milik Daerah	1. Penyusunan HSPK (Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi) yang mengikuti perkembangan pasar.

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	1. Melaksanakan penyesuaian substansi RTRWP dengan dinamika Kebijakan 2. Melaksanakan Kajian-Kajian dalam rangka revisi RTRWP
				3. Menyediakan Perda RTRW Provinsi
				4. Peningkatan Pemahaman Sektoral dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Penataan Ruang
			Meningkatkan Fasilitasi RTR Kabupaten /Kota	1. Memberikan Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota
				2. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi dengan RTR Kabupaten/Kota
				3. Peningkatan Pemahaman masyarakat terkait penataan ruang
			Meningkatkan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan
			Meningkatkan Pelaksanaan Sinkronisasi Program	1. Melaksanakan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
				2. Menyediakan dan Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
				3. Meningkatkan kualitas data geospasial
			Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	1. Peningkatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
				2. Melaksanakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Penilaian Kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
			Meningkatkan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Peningkatan koordinasi kelembagaan penataan ruang
				2. Melaksanakan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
				3. Optimalisasi perijinan pemanfaatan ruang
2.	Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PE)	Terjaganya Kondisi Jalan Mantap	Optimalisasi Pemeliharaan Permukaan Jalan dan Jembatan Untuk Mempertahankan Kondisi Mantap	1. Perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap;
				2. Optimalisasi bangunan pelengkap jalan (saluran , dinding penahan tanah dan bahu jalan);
				3. Rehabilitasi ruas jalan yang sudah melampaui umur rencana;
				4. Pengadaan peralatan pendukung pemeliharaan rutin;
				5. Perbaikan kerusakan yang terjadi pada jembatan;
				6. Rehabilitasi Jembatan yang sudah melampaui umur rencana;
				7. Pelebaran jembatan yang sesuai standar.
			Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan Sesuai Standar	1. Pelebaran jalan sesuai standar jalan kolektor (7m);
				2. Peningkatan kualitas struktur jalan sesuai standar jalan kolektor (MST 8 ton);
				3. Pembangunan jalan baru (relokasi) ruas jalan yang berpotensi rawan longsor, banjir dan tanah labil/bergerak.

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				4. Pembebasan tanah/lahan yang diperlukan
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Peningkatan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
Pengelolaan data dan informasi Pengelolaan SDA	Pengelolaan data dan informasi Pengelolaan SDA	Pengelolaan data dan informasi Pengelolaan SDA	Pengelolaan data dan informasi Pengelolaan SDA	Pengelolaan data dan informasi Pengelolaan SDA
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Rehabilitasi	Rehabilitasi	Rehabilitasi	Rehabilitasi	Rehabilitasi

Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembangunan Tanggul Sungai
Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai
Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan
Pemeliharaan	Pemeliharaan	Pemeliharaan	Pemeliharaan	Pemeliharaan

Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Rutin Jembatan	Rutin Jembatan	Rutin Jembatan	Rutin Jembatan	Rutin Jembatan
Peningkatan jalan pada akses hilirisasi sektor pertanian	Peningkatan jalan pada akses Pariwisata	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Pembangunan Desalinasi air	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembangunan Desalinasi air	Pembangunan Desalinasi air	Pembangunan Desalinasi air
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang
Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
Pengawasan	Pengawasan	Pengawasan	Pengawasan	Pengawasan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK

3.3 MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 3.5 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (IKLH)	Persentase Tingkat Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air	Menurunnya kinerja sistem irigasi	12	Kerusakan sarpras jaringan irigasi, kurang efektifnya manajemen alokasi air, terbatasnya kapasitas SDM dan kelembagaan	Produktivitas pertanian menurun	Rehabilitasi dan pemeliharaan sarpras jaringan irigasi, Rakor alokasi air, Pembinaan SDM dan kelembagaan	Kepala Dinas	Setiap tahun
		Menurunnya Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air	12	Kerusakan sarpras sungai, terbatasnya bangunan pengendali banjir, rendahnya kepedulian masyarakat	Meningkatnya ancaman bencana banjir/rob	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarpras sungai	Kepala Dinas	Setiap tahun
				Kurangnya jumlah sarpras air baku	Tidak terpenuhinya kebutuhan air baku	Membangun embung dan tampungan air lainnya	Kepala Dinas	Setiap tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Tidak tersedianya Rencana Teknis terhadap kebutuhan Rencana Pembangunan Infrastruktur SDA	12	Kurangnya penyediaan dokumen perencanaan teknis	tidak tercapainya rencana pembangunan Infrastruktur SDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis	Kepala Dinas	Setiap tahun
	Persentase Keterwujudan Penataan Ruang	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	12	Terbatasnya Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan pembangunan	Terganggunya aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.	Mendorong kementerian/ lembaga untuk mensingkronkan kebijakan dengan memperhatikan kondisi aktual wilayah kabupaten/kota agar kebijakan dapat diimplementasikan	Kepala Dinas	Setiap Tahun
				Belum optimalnya aspek pengaturan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penataan ruang.	Terganggunya aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.	Mengoptimalkan koordinasi antar sektor dalam perencanaan pemanfaatan ruang sehingga tidak	Kepala Dinas	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
						terjadi tumpang tindih kebijakan		
				Kurangnya pemahaman SDM pemerintah daerah dibidang penataan ruang	Terganggunya aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.	Penguatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, bimtek, seminar, dan workshop.	Kepala Dinas	Setiap Tahun
Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	Tidak tercapainya umur perencanaan jalan	16	kendaraan dengan muatan berlebih dan derajat kejenuhan kendaraan yang tinggi	Tingkat kerusakan meningkat sehingga potensi kecelakaan meningkat	Peningkatan standar kolektor provinsi menjadi maksimal ≤ 10 Ton	Kepala Dinas DPU BMCK	15 Tahun

Tabel 3.6 Tabel Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	Kesulitan dalam melaksanakan pelebaran jalan	Risiko operasional	Di beberapa daerah masih terdapat jalan yang berada di daerah ekstrem (di pinggir jurang, gunung, bukit dll)	Jalan Provinsi tidak sesuai dengan standar jalan kolektor	Dinas PU dan Cipta Karya; Masyarakat Pengguna jalan
					Risiko operasional	Masalah pembebasan lahan		
				Tidak tercapainya umur perencanaan jalan	Risiko operasional	kendaraan dengan muatan berlebih dan derajat kejenuhan kendaraan yang tinggi	Tingkat kerusakan meningkat sehingga potensi kecelakaan meningkat	Dinas PU dan Cipta Karya; Masyarakat Pengguna jalan
2	Sasaran Strategis	Terjaganya kondisi permukaan jalan mantap	Persentase panjang jaIan provinsi kondisi permukaaan mantap	Terjadi kerusakan jalan diluar perencanaan	Risiko operasional	Terjadi bencana alam dan cuaca ekstrem	Jalan menjadi rusak dan potensi kecelakaan meningkat	Dinas PU dan Cipta Karya; Masyarakat Pengguna jalan
					Risiko operasional	Pengguna jalan yang melebihi standar (overload)		
			Persentase kondisi jembatan provinsi baik	Terjadi Kerusakan jembatan diluar perencanaan	Risiko operasional	Terjadi bencana alam dan cuaca ekstrem	Jembatan menjadi rusak dan potensi kecelakaan meningkat	Dinas PU dan Cipta Karya; Masyarakat Pengguna jalan
					Risiko operasional	Pengguna jembatan melebihi standar (overload)		
3	Sasaran Strategis	Meningkatkan akses air minum aman	Persentase akses air minum aman	Kurangnya minat masyarakat untuk mengakses layanan air minum layak terbangun	Risiko operasional	Adanya alternatif sumber air bersih lain (sumur dangkal)	Gangguan kesehatan masyarakat	Masyarakat, PDAM, Desa/ Kelurahan, Kabupaten/Kota

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Strategis	Meningkatkan akses air limbah domestik aman	Persentase akses air limbah domestik aman	Pengolahan air limbah domestik belum optimal	Risiko operasional	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan pengelolaan air limbah domestik yang telah tersedia	Gangguan kesehatan masyarakat	Masyarakat, Desa/ Kelurahan, Kabupaten/Kota
5	Sasaran Strategis	Meningkatkan kualitas hasil penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah	Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	Penyelenggaraan BGMD tidak sesuai standar	Risiko operasional	Kurangnya pemahaman peraturan dan standar teknis bangunan gedung	Keselamatan konstruksi	Pengguna Gedung
					Risiko Kebijakan	Peraturan bangunan gedung yang dinamis	Perubahan standar BGMD	Penyelenggara Gedung
					Risiko operasional	Perencanaan yang tidak sesuai standar teknis	Bangunan gedung yang tidak sesuai standar (keselamatan, keamanan, kenyamanan)	Pengguna Gedung
					Risiko operasional	Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan konstruksi		

Tabel 3.7 Tabel Analisis Risiko

NO	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kesulitan dalam melaksanakan pelebaran jalan	3	3	9	Ada	Optimalisasi pelebaran ruas jalan sesuai ketersediaan tanah pada bahu jalan/ rumija	Memadai	2	2	4
2	Tidak tercapainya umur perencanaan jalan	5	4	20	Ada	Penyediaan rambu-rambu kelas jalan	Belum Memadai	4	4	16
3	Terjadi kerusakan jalan diluar perencanaan	2	3	6	Ada	Pemeliharaan rutin jalan dengan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC)	Memadai	2	3	6
4	Terjadi Kerusakan jembatan diluar perencanaan	3	4	12	Ada	Pemeliharaan rutin jembatan	Memadai	3	3	9
5	Kurangnya minat masyarakat untuk mengakses layanan air minum layak terbangun	3	3	9	Ada	Pembinaan dan monev	Memadai	2	2	4
6	Pengolahan air limbah domestik belum optimal	3	3	9	Ada	Bimbingan teknis (bintek) dan monev	Memadai	2	2	4
7	Penyelenggaraan BGMD tidak sesuai standar	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan bantuan teknis (monev)	Memadai	2	2	4

Tabel 3.8 Tabel Penetapan Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak tercapainya umur perencanaan jalan	16	Kepala Dinas DPU BMCK	kendaraan dengan muatan berlebih dan derajat kejenuhan kendaraan yang tinggi	Tingkat kerusakan meningkat sehingga potensi kecelakaan meningkat

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan perangkat daerah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah telah menyusun berbagai kebijakan hingga program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi. Tabel 6.1 di bawah ini merupakan penjabaran lengkap terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 yang dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran OPD.

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di DPUPR								237.343.848		210.697.519		204.730.785		201.842.929		200.132.840	DPUPR	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DPUPR	Angka	N/A	80,02	0	80,82	0	81,62	0	82,42	0	83,22	0	DPUPR	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di DPUPR							1.945.000		1.945.000		1.945.000		2.040.000		1.945.000	DPUPR	
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah DPUPR	Angka	N/A	2,97	1.945.000	2,99	1.945.000	3,02	1.945.000	3,04	2.040.000	3,07	1.945.000	DPUPR	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.945.000		1.945.000		1.945.000		2.040.000		1.945.000	DPUPR	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di DPUPR	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah DPUPR	%	100	100	1.945.000	100	1.945.000	100	1.945.000	100	2.040.000	100	1.945.000	DPUPR	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.945.000		1.945.000		1.945.000		2.040.000		1.945.000	DPUPR	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	1.945.000	100	1.945.000	100	1.945.000	100	2.040.000	100	1.945.000	Sub Bag Program	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						925.000		925.000		925.000		1.020.000		925.000	DPUPR	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	21	23	925.000	23	925.000	23	925.000	23	1.020.000	23	925.000	Sub Bag Program	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						920.000		920.000		920.000		920.000		920.000	DPUPR	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	45	920.000	45	920.000	45	920.000	45	920.000	45	920.000	Sub Bag Program	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	DPUPR	
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	N/A	140	50.000	140	50.000	140	50.000	140	50.000	140	50.000	Sub Bag Program	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	DPUPR	
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	N/A	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	Sub Bag Program	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di DPUPR							235.398.848		208.752.519		202.785.785		199.802.929		198.187.840	DPUPR	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah DPUPR	Angka	N/A	88,8	235.398.848	88,85	208.752.519	88,9	202.785.785	88,95	199.802.929	89	198.187.840	DPUPR	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						207.396.801		178.969.146		172.648.786		168.269.711		165.336.958	DPUPR	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di DPUPR	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah DPUPR	%	100	100	207.396.801	100	178.969.146	100	172.648.786	100	168.269.711	100	165.336.958	DPUPR	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						160.295.022		151.185.946		144.483.042		139.326.961		136.061.443	DPUPR	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	45	45	160.295.022	45	151.185.946	45	144.483.042	45	139.326.961	45	136.061.443	Sub Bag Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						155.983.594		146.874.518		140.171.614		135.015.533		131.750.015	DPUPR	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	477	957	155.983.594	904	146.874.518	865	140.171.614	835	135.015.533	816	131.750.015	Sub Bag Keuangan	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2.955.120		2.955.120		2.955.120		2.955.120		2.955.120	DPUPR	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	2.955.120	12	2.955.120	12	2.955.120	12	2.955.120	12	2.955.120	Sub Bag Keuangan	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						1.356.308		1.356.308		1.356.308		1.356.308		1.356.308	DPUPR	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	19	19	1.356.308	19	1.356.308	19	1.356.308	19	1.356.308	19	1.356.308	Sub Bag Keuangan	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						771.850		771.850		771.850		771.850		771.850	DPUPR	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	13	30	771.850	30	771.850	30	771.850	30	771.850	30	771.850	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						771.850		771.850		771.850		771.850		771.850	DPUPR	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	13	30	771.850	30	771.850	30	771.850	30	771.850	30	771.850	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.632.863		1.623.679		1.624.858		1.633.213		1.650.111	DPUPR	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100	1.632.863	100	1.623.679	100	1.624.858	100	1.633.213	100	1.650.111	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						622.050		587.600		562.250		542.750		530.400	DPUPR	
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	622.050	1	587.600	1	562.250	1	542.750	1	530.400	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	DPUPR	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						725.813		751.079		777.608		805.463		834.711	DPUPR	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	477	957	725.813	904	751.079	865	777.608	835	805.463	816	834.711	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	DPUPR	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	957	100.000	904	100.000	865	100.000	835	100.000	816	100.000	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						110.000		110.000		110.000		110.000		110.000	DPUPR	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	957	110.000	904	110.000	865	110.000	835	110.000	816	110.000	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.331.693		4.331.693		4.331.693		4.331.693		4.331.693	DPUPR	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	4.331.693	100	4.331.693	100	4.331.693	100	4.331.693	100	4.331.693	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						116.324		116.324		116.324		116.324		116.324	DPUPR	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	116.324	1	116.324	1	116.324	1	116.324	1	116.324	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						215.000		215.000		215.000		215.000		215.000	DPUPR	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	215.000	1	215.000	1	215.000	1	215.000	1	215.000	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						508.290		508.290		508.290		508.290		508.290	DPUPR	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	508.290	1	508.290	1	508.290	1	508.290	1	508.290	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						116.324		116.324		116.324		116.324		116.324	DPUPR	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	116.324	2	116.324	2	116.324	2	116.324	2	116.324	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						30.250		30.250		30.250		30.250		30.250	DPUPR	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2172	2172	30.250	2172	30.250	2172	30.250	2172	30.250	2172	30.250	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.515.440		2.515.440		2.515.440		2.515.440		2.515.440	DPUPR	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	2.515.440	12	2.515.440	12	2.515.440	12	2.515.440	12	2.515.440	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	DPUPR	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						680.065		680.065		680.065		680.065		680.065	DPUPR	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	680.065	1	680.065	1	680.065	1	680.065	1	680.065	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.721.500		5.009.500		4.948.000		5.229.500		5.009.500	DPUPR	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	615	361	5.721.500	333	5.009.500	320	4.948.000	344	5.229.500	333	5.009.500	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.025.000		2.025.000		2.025.000		2.025.000		2.025.000	DPUPR	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	18	2.025.000	18	2.025.000	18	2.025.000	18	2.025.000	18	2.025.000	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pengadaan Mebel						643.175		601.175		601.175		601.175		601.175	DPUPR	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	438	173	643.175	165	601.175	165	601.175	165	601.175	165	601.175	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.053.325		2.383.325		2.321.825		2.603.325		2.383.325	DPUPR	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	127	170	3.053.325	150	2.383.325	137	2.321.825	161	2.603.325	150	2.383.325	Sub Bag Umum Dan	KOTA SEMARAN

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Lainnya yang Disediakan													Kepegawaian	G / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.833.227		10.235.832		10.678.697		11.165.848		11.701.715	DPUPR	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	50	50	9.833.227	50	10.235.832	50	10.678.697	50	11.165.848	50	11.701.715	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						99.700		99.700		99.700		99.700		99.700	DPUPR	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	99.700	12	99.700	12	99.700	12	99.700	12	99.700	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.368.662		2.368.662		2.368.662		2.368.662		2.368.662	DPUPR	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	2.368.662	12	2.368.662	12	2.368.662	12	2.368.662	12	2.368.662	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						7.364.865		7.767.470		8.210.335		8.697.486		9.233.353	DPUPR	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	26	26	7.364.865	26	7.767.470	26	8.210.335	26	8.697.486	26	9.233.353	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.810.646		5.810.646		5.810.646		5.810.646		5.810.646	DPUPR	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	439	610	24.810.646	610	5.810.646	610	5.810.646	630	5.810.646	630	5.810.646	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.419.600		2.419.600		2.419.600		2.419.600		2.419.600	DPUPR	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	91	2.419.600	91	2.419.600	91	2.419.600	91	2.419.600	91	2.419.600	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						21.175.000		2.175.000		2.175.000		2.175.000		2.175.000	DPUPR	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	4	21.175.000	4	2.175.000	4	2.175.000	4	2.175.000	4	2.175.000	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.216.046		1.216.046		1.216.046		1.216.046		1.216.046	DPUPR	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	405	515	1.216.046	515	1.216.046	515	1.216.046	515	1.216.046	515	1.216.046	Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Dipelihara/Direhabilitasi														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.106.487		2.240.049		2.386.249		2.546.315		2.721.597	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	%	100	100	2.106.487	100	2.240.049	100	2.386.249	100	2.546.315	100	2.721.597	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						308.190		309.474		310.823		312.238		313.725	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	308.190	100	309.474	100	310.823	100	312.238	100	313.725	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	AN ALAT BERAT	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / SEMARANG
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / SEMARANG
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / SEMARANG
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.200		10.200		10.200		10.200		10.200	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	2	10.200	2	10.200	2	10.200	2	10.200	2	10.200	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / SEMARANG
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	672	2.500	672	2.500	672	2.500	672	2.500	672	2.500	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / SEMARANG
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						173.740		175.024		176.373		177.788		179.275	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12	173.740	12	175.024	12	176.373	12	177.788	12	179.275	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / SEMARANG
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						21.750		21.750		21.750		21.750		21.750	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.428.422		1.556.882		1.697.534		1.851.566		2.020.280	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	26	1.428.422	26	1.556.882	26	1.697.534	26	1.851.566	26	2.020.280	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.750		2.750		2.750		2.750		2.750	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	2.750	12	2.750	12	2.750	12	2.750	12	2.750	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / SEMARANG
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						261.387		274.456		288.179		302.588		317.717	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	12	261.387	12	274.456	12	288.179	12	302.588	12	317.717	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.164.285		1.279.676		1.406.605		1.546.228		1.699.813	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	2	1.164.285	2	1.279.676	2	1.406.605	2	1.546.228	2	1.699.813	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / SEMARANG
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						369.875		373.693		377.892		382.511		387.592	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	51	75	369.875	80	373.693	83	377.892	83	382.511	87	387.592	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						133.800		133.800		133.800		133.800		133.800	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	11	133.800	11	133.800	11	133.800	11	133.800	11	133.800	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / SEMARANG
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						86.075		89.893		94.092		98.711		103.792	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	62	86.075	67	89.893	70	94.092	70	98.711	74	103.792	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / SEMARANG
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						899.540		977.450		1.062.850		1.157.050		1.260.250	DPUPR - BALAI JAKON	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BALAI JAKON	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BALAI JAKON	%	100	100	899.540	100	977.450	100	1.062.850	100	1.157.050	100	1.260.250	DPUPR - BALAI JAKON	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						175.050		190.450		207.250		225.950		246.050	DPUPR - BALAI JAKON	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	175.050	100	190.450	100	207.250	100	225.950	100	246.050	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.300		10.200		11.300		12.400		13.600	DPUPR - BALAI JAKON	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	9.300	1	10.200	1	11.300	1	12.400	1	13.600	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						38.600		42.500		46.700		51.400		56.500	DPUPR - BALAI JAKON	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	38.600	1	42.500	1	46.700	1	51.400	1	56.500	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.300		10.200		11.300		12.400		13.600	DPUPR - BALAI JAKON	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	1	9.300	1	10.200	1	11.300	1	12.400	1	13.600	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.900		3.200		3.500		3.900		4.200	DPUPR - BALAI JAKON	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	2	2.900	2	3.200	2	3.500	2	3.900	2	4.200	Kasubag Tata Usaha	DPUPR - BALAI JAKON
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						3.500		3.900		4.200		4.700		5.100	DPUPR - BALAI JAKON	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	672	3.500	672	3.900	672	4.200	672	4.700	672	5.100	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						89.700		98.700		108.500		119.400		131.300	DPUPR - BALAI JAKON	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12	89.700	12	98.700	12	108.500	12	119.400	12	131.300	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						21.750		21.750		21.750		21.750		21.750	DPUPR - BALAI JAKON	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						542.490		596.800		656.300		722.000		794.200	DPUPR - BALAI JAKON	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	26	542.490	26	596.800	26	656.300	26	722.000	26	794.200	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.600		1.800		1.900		2.100		2.300	DPUPR - BALAI JAKON	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	12	1.600	12	1.800	12	1.900	12	2.100	12	2.300	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						94.000		103.400		113.700		125.100		137.600	DPUPR - BALAI JAKON	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	12	94.000	12	103.400	12	113.700	12	125.100	12	137.600	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						446.890		491.600		540.700		594.800		654.300	DPUPR - BALAI JAKON	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	2	446.890	2	491.600	2	540.700	2	594.800	2	654.300	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						182.000		190.200		199.300		209.100		220.000	DPUPR - BALAI JAKON	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	44	41	182.000	45	190.200	48	199.300	48	209.100	52	220.000	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						55.000		60.500		66.600		73.200		80.500	DPUPR - BALAI JAKON	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	2	55.000	2	60.500	2	66.600	2	73.200	2	80.500	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	DPUPR - BALAI JAKON	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						27.000		29.700		32.700		35.900		39.500	DPUPR - BALAI JAKON	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	38	27.000	42	29.700	45	32.700	45	35.900	49	39.500	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.776.750		1.858.350		1.839.950		1.821.550		1.902.150	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPJ WIL. Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat BeratBPJ WIL. Semarang	%	100	100	1.776.750	100	1.858.350	100	1.839.950	100	1.821.550	100	1.902.150	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	N/A	N/A	60.000	N/A	60.000	N/A	60.000	N/A	60.000	N/A	60.000	Kasubag Tata Usaha	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	6	60.000	6	60.000	6	60.000	6	60.000	6	60.000	Kasubag Tata Usaha	BATANG / DEMAK / KENDAL / KOTA SEMARANG / OPD Provinsi / SEMARANG
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						281.750		287.750		293.750		299.750		304.750	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	281.750	100	287.750	100	293.750	100	299.750	100	304.750	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.000		12.000		13.000		14.000		15.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	11.000	1	12.000	1	13.000	1	14.000	1	15.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						73.000		74.000		75.000		76.000		77.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	73.000	1	74.000	1	75.000	1	76.000	1	77.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000		21.000		22.000		23.000		24.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	1	20.000	1	21.000	1	22.000	1	23.000	1	24.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000		36.000		37.000		38.000		38.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	2	35.000	2	36.000	2	37.000	2	38.000	2	38.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						6.000		7.000		8.000		9.000		10.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	384	6.000	384	7.000	384	8.000	384	9.000	384	10.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						115.000		116.000		117.000		118.000		119.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12	115.000	12	116.000	12	117.000	12	118.000	12	119.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						21.750		21.750		21.750		21.750		21.750	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						795.000		860.600		926.200		991.800		1.057.400	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	26	795.000	26	860.600	26	926.200	26	991.800	26	1.057.400	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.000		10.000		11.000		12.000		13.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	12	9.000	12	10.000	12	11.000	12	12.000	12	13.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						190.000		195.000		200.000		205.000		210.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	12	190.000	12	195.000	12	200.000	12	205.000	12	210.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						596.000		655.600		715.200		774.800		834.400	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	2	596.000	2	655.600	2	715.200	2	774.800	2	834.400	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						640.000		650.000		560.000		470.000		480.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	45	54	640.000	59	650.000	62	560.000	62	470.000	66	480.000	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						180.000		185.000		190.000		195.000		200.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	6	180.000	6	185.000	6	190.000	6	195.000	6	200.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						400.000		400.000		300.000		200.000		200.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	2	400.000	2	400.000	2	300.000	2	200.000	2	200.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						60.000		65.000		70.000		75.000		80.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	N/A	46	60.000	51	65.000	54	70.000	54	75.000	58	80.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SEMARANG / OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Dipelihara/Direhabilitasi														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.879.250		1.942.250		1.991.250		2.042.750		2.025.250	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPJ WIL. Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	100	100	1.879.250	100	1.942.250	100	1.991.250	100	2.042.750	100	2.025.250	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						125.000		125.000		120.000		120.000		50.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	N/A	25	125.000	25	125.000	24	120.000	24	120.000	10	50.000	Kasubag Tata Usaha	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						125.000		125.000		120.000		120.000		50.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	25	125.000	25	125.000	24	120.000	24	120.000	10	50.000	Kasubag Tata Usaha	JEPARA / KUDUS / OPD Provinsi / PATI / REMBANG
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						335.250		342.250		349.750		353.750		358.750	DPUPR - BPJ WIL. PATI	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	335.250	100	342.250	100	349.750	100	353.750	100	358.750	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						24.000		25.000		26.000		27.000		28.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	24.000	1	25.000	1	26.000	1	27.000	1	28.000	Kasubag Tata Usaha	KUDUS / OPD Provinsi / PATI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000	Kasubag Tata Usaha	KUDUS / OPD Provinsi / PATI
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						24.000		25.000		26.000		27.000		28.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	1	24.000	1	25.000	1	26.000	1	27.000	1	28.000	Kasubag Tata Usaha	KUDUS / OPD Provinsi / PATI
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.000		22.000		22.000		22.000		22.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	2	22.000	2	22.000	2	22.000	2	22.000	2	22.000	Kasubag Tata Usaha	KUDUS / OPD Provinsi / PATI
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						3.500		3.500		4.000		4.000		4.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	720	3.500	720	3.500	720	4.000	720	4.000	720	4.000	Kasubag Tata Usaha	KUDUS / OPD Provinsi / PATI
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						180.000		185.000		190.000		192.000		195.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12	180.000	12	185.000	12	190.000	12	192.000	12	195.000	Kasubag Tata Usaha	KUDUS / OPD Provinsi / PATI
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						21.750		21.750		21.750		21.750		21.750	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / PATI
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						879.000		920.000		960.500		1.001.000		1.041.500	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	26	879.000	26	920.000	26	960.500	26	1.001.000	26	1.041.500	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000		5.000		5.500		6.000		6.500	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	12	4.000	12	5.000	12	5.500	12	6.000	12	6.500	Kasubag Tata Usaha	KUDUS / OPD Provinsi / PATI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						155.000		165.000		175.000		185.000		195.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	12	155.000	12	165.000	12	175.000	12	185.000	12	195.000	Kasubag Tata Usaha	KUDUS / OPD Provinsi / PATI
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						720.000		750.000		780.000		810.000		840.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	2	720.000	2	750.000	2	780.000	2	810.000	2	840.000	Kasubag Tata Usaha	KUDUS / OPD Provinsi / PATI
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						540.000		555.000		561.000		568.000		575.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	N/A	N/A	540.000	N/A	555.000	N/A	561.000	N/A	568.000	N/A	575.000	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000		113.000		116.000		118.000		120.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	7	100.000	7	113.000	7	116.000	7	118.000	7	120.000	Kasubag Tata Usaha	KUDUS / OPD Provinsi / PATI

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	3	400.000	3	400.000	3	400.000	3	400.000	3	400.000	Kasubag Tata Usaha	KUDUS / OPD Provinsi / PATI
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.000		42.000		45.000		50.000		55.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	88	40.000	93	42.000	96	45.000	96	50.000	100	55.000	Kasubag Tata Usaha	KUDUS / OPD Provinsi / PATI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.927.241		3.159.610		3.405.515		3.709.830		3.981.679	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPJ WIL. Purwodadi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPJ WIL. Purwodadi	%	100	100	2.927.241	100	3.159.610	100	3.405.515	100	3.709.830	100	3.981.679	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						124.800		124.800		93.600		93.600		31.200	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	N/A	20	124.800	20	124.800	15	93.600	15	93.600	5	31.200	Kasubag Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						124.800		124.800		93.600		93.600		31.200	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	20	124.800	20	124.800	15	93.600	15	93.600	5	31.200	Kasubag Tata Usaha	BLORA / GROBOGAN / OPD Provinsi / SRAGEN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						412.800		451.905		494.920		542.236		594.285	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	412.800	100	451.905	100	494.920	100	542.236	100	594.285	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.950		17.545		19.299		21.229		23.352	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	15.950	1	17.545	1	19.299	1	21.229	1	23.352	Kasubag Tata Usaha	BLORA / GROBOGAN / OPD Provinsi / SRAGEN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						67.100		73.810		81.191		89.310		98.241	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	67.100	1	73.810	1	81.191	1	89.310	1	98.241	Kasubag Tata Usaha	BLORA / GROBOGAN / OPD Provinsi / SRAGEN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						19.800		21.780		23.958		26.353		28.989	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	1	19.800	1	21.780	1	23.958	1	26.353	1	28.989	Kasubag Tata Usaha	BLORA / GROBOGAN / OPD Provinsi / SRAGEN
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						55.000		60.500		66.550		73.205		80.525	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	2	55.000	2	60.500	2	66.550	2	73.205	2	80.525	Kasubag Tata Usaha	BLORA / GROBOGAN / OPD Provinsi / SRAGEN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						2.200		2.420		2.662		2.928		3.221	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	336	2.200	336	2.420	336	2.662	336	2.928	336	3.221	Kasubag Tata Usaha	BLORA / GROBOGAN / OPD Provinsi / SRAGEN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						231.000		254.100		279.510		307.461		338.207	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12	231.000	12	254.100	12	279.510	12	307.461	12	338.207	Kasubag Tata Usaha	BLORA / GROBOGAN / OPD Provinsi / SRAGEN
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						21.750		21.750		21.750		21.750		21.750	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	Kasubag Tata Usaha	GROBOGAN / OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.564.281		1.710.709		1.871.780		2.048.957		2.243.854	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	26	1.564.281	26	1.710.709	26	1.871.780	26	2.048.957	26	2.243.854	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.600		7.260		7.986		8.784		9.663	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	12	6.600	12	7.260	12	7.986	12	8.784	12	9.663	Kasubag Tata Usaha	BLORA / GROBOGAN / OPD Provinsi / SRAGEN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						366.200		392.820		422.102		454.312		489.743	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	12	366.200	12	392.820	12	422.102	12	454.312	12	489.743	Kasubag Tata Usaha	BLORA / GROBOGAN / OPD Provinsi / SRAGEN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.191.481		1.310.629		1.441.692		1.585.861		1.744.448	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	2	1.191.481	2	1.310.629	2	1.441.692	2	1.585.861	2	1.744.448	Kasubag Tata Usaha	BLORA / GROBOGAN / OPD Provinsi / SRAGEN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						825.360		872.196		945.215		1.025.037		1.112.340	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	47	77	825.360	82	872.196	85	945.215	85	1.025.037	89	1.112.340	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						196.613		201.774		223.451		246.796		271.976	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	31	196.613	31	201.774	31	223.451	31	246.796	31	271.976	Kasubag Tata Usaha	BLORA / GROBOGAN / OPD Provinsi / SRAGEN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						535.000		573.500		615.850		662.435		713.678	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	6	535.000	6	573.500	6	615.850	6	662.435	6	713.678	Kasubag Tata Usaha	BLORA / GROBOGAN / OPD Provinsi / SRAGEN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						93.747		96.922		105.914		115.806		126.686	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	N/A	40	93.747	45	96.922	48	105.914	48	115.806	52	126.686	Kasubag Tata Usaha	BLORA / GROBOGAN / OPD Provinsi / SRAGEN

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Dipelihara/Direhabilitasi														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.485.650		1.641.536		1.700.640		1.875.460		2.004.900	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPJ WIL. Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPJ WIL. Surakarta	%	100	100	1.485.650	100	1.641.536	100	1.700.640	100	1.875.460	100	2.004.900	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	N/A	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	Kasubag Tata Usaha	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	Kasubag Tata Usaha	BOYOLALI / KARANGANYAR / KLATEN / KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi / SUKOHARJO / WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						278.630		286.233		294.065		307.509		321.624	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	278.630	100	286.233	100	294.065	100	307.509	100	321.624	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.150		5.305		5.465		5.739		6.026	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	5.150	1	5.305	1	5.465	1	5.739	1	6.026	Kasubag Tata Usaha	KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						44.290		45.619		46.988		49.338		51.805	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	44.290	1	45.619	1	46.988	1	49.338	1	51.805	Kasubag Tata Usaha	KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.240		8.488		8.743		9.181		9.641	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	1	8.240	1	8.488	1	8.743	1	9.181	1	9.641	Kasubag Tata Usaha	KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.600		21.218		21.855		22.948		24.096	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	2	20.600	2	21.218	2	21.855	2	22.948	2	24.096	Kasubag Tata Usaha	KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	672	3.500	672	3.500	672	3.500	672	3.500	672	3.500	Kasubag Tata Usaha	KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						175.100		180.353		185.764		195.053		204.806	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12	175.100	12	180.353	12	185.764	12	195.053	12	204.806	Kasubag Tata Usaha	KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						21.750		21.750		21.750		21.750		21.750	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	Kasubag Tata Usaha	KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						627.670		666.182		707.239		753.672		803.222	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	26	627.670	26	666.182	26	707.239	26	753.672	26	803.222	Kasubag Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	12	6.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						125.145		128.900		132.767		139.406		146.377	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	12	125.145	12	128.900	12	132.767	12	139.406	12	146.377	Kasubag Tata Usaha	KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						496.525		531.282		568.472		608.266		650.845	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	2	496.525	2	531.282	2	568.472	2	608.266	2	650.845	Kasubag Tata Usaha	KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						504.350		614.121		624.336		739.279		805.054	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	64	73	504.350	80	614.121	83	624.336	83	739.279	87	805.054	Kasubag Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.850		206.876		213.083		223.738		234.925	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	17	200.850	17	206.876	17	213.083	17	223.738	17	234.925	Kasubag Tata Usaha	KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						250.000		350.000		350.000		450.000		500.000	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	6	250.000	8	350.000	8	350.000	8	450.000	8	500.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						53.500		57.245		61.253		65.541		70.129	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	50	53.500	55	57.245	58	61.253	58	65.541	62	70.129	Kasubag Tata Usaha	KOTA SURAKARTA / OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.519.040		2.659.850		2.805.660		2.951.410		3.117.250	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPJ WIL. Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPJ WIL. Magelang	%	100	100	2.519.040	100	2.659.850	100	2.805.660	100	2.951.410	100	3.117.250	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						34.790		24.850		14.910		14.910		35.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	N/A	7	34.790	5	24.850	3	14.910	3	14.910	5	35.000	Kasubag Tata Usaha	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						34.790		24.850		14.910		14.910		35.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	7	34.790	5	24.850	3	14.910	3	14.910	5	35.000	Kasubag Tata Usaha	KEBUMEN / KOTA MAGELANG / MAGELANG / OPD Provinsi / PURWOREJO
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						416.750		455.250		493.750		532.250		570.750	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	416.750	100	455.250	100	493.750	100	532.250	100	570.750	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000		22.000		24.000		26.000		28.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	N/A	1	20.000	1	22.000	1	24.000	1	26.000	1	28.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA MAGELANG / OPD Provinsi /

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Bangunan Kantor yang Disediakan														PURWOREJO
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000		66.000		72.000		78.000		84.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	60.000	1	66.000	1	72.000	1	78.000	1	84.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA MAGELANG / OPD Provinsi / PURWOREJO
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.000		27.500		30.000		32.500		35.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	1	25.000	1	27.500	1	30.000	1	32.500	1	35.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA MAGELANG / OPD Provinsi / PURWOREJO
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000		55.000		60.000		65.000		70.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	2	50.000	2	55.000	2	60.000	2	65.000	2	70.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA MAGELANG / OPD Provinsi / PURWOREJO
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	702	10.000	702	10.000	702	10.000	702	10.000	702	10.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA MAGELANG / OPD Provinsi / PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						230.000		253.000		276.000		299.000		322.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12	230.000	12	253.000	12	276.000	12	299.000	12	322.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA MAGELANG / OPD Provinsi / PURWOREJO
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						21.750		21.750		21.750		21.750		21.750	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	Kasubag Tata Usaha	KOTA MAGELANG / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						797.500		875.750		959.000		1.032.250		1.105.500	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	26	797.500	26	875.750	26	959.000	26	1.032.250	26	1.105.500	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.500		8.250		9.000		9.750		10.500	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	12	7.500	12	8.250	12	9.000	12	9.750	12	10.500	Kasubag Tata Usaha	KOTA MAGELANG / OPD Provinsi / PURWOREJO
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						125.000		137.500		150.000		162.500		175.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	N/A	12	125.000	12	137.500	12	150.000	12	162.500	12	175.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA MAGELANG / OPD Provinsi /

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Daya Air dan Listrik yang Disediakan														PURWOREJO
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						665.000		730.000		800.000		860.000		920.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	2	665.000	2	730.000	2	800.000	2	860.000	2	920.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA MAGELANG / OPD Provinsi / PURWOREJO
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.270.000		1.304.000		1.338.000		1.372.000		1.406.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	64	69	1.270.000	74	1.304.000	77	1.338.000	77	1.372.000	81	1.406.000	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						230.000		253.000		276.000		299.000		322.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	11	230.000	11	253.000	11	276.000	11	299.000	11	322.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA MAGELANG / OPD Provinsi / PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						930.000		930.000		930.000		930.000		930.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	11	930.000	11	930.000	11	930.000	11	930.000	11	930.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA MAGELANG / OPD Provinsi / PURWOREJO
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						110.000		121.000		132.000		143.000		154.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	47	110.000	52	121.000	55	132.000	55	143.000	59	154.000	Kasubag Tata Usaha	KOTA MAGELANG / OPD Provinsi / PURWOREJO
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.342.014		1.366.247		1.406.004		1.460.737		1.520.943	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPJ WIL. Wonosobo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPJ WIL. Wonosobo	%	100	100	1.342.014	100	1.366.247	100	1.406.004	100	1.460.737	100	1.520.943	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						47.000		26.000		16.000		16.000		16.000	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	N/A	9	47.000	5	26.000	3	16.000	3	16.000	3	16.000	Kasubag Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						47.000		26.000		16.000		16.000		16.000	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	9	47.000	5	26.000	3	16.000	3	16.000	3	16.000	Kasubag Tata Usaha	BANJARNEGARA / OPD Provinsi / TEMANGGUNG / WONOSOBO
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						291.250		291.250		291.250		291.250		291.250	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	291.250	100	291.250	100	291.250	100	291.250	100	291.250	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	17.000	1	17.000	1	17.000	1	17.000	1	17.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / WONOSOBO
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / WONOSOBO
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	1	14.000	1	14.000	1	14.000	1	14.000	1	14.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / WONOSOBO
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						39.000		39.000		39.000		39.000		39.000	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	2	39.000	2	39.000	2	39.000	2	39.000	2	39.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / WONOSOBO
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	672	2.500	672	2.500	672	2.500	672	2.500	672	2.500	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / WONOSOBO
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						157.000		157.000		157.000		157.000		157.000	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12	157.000	12	157.000	12	157.000	12	157.000	12	157.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / WONOSOBO
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						21.750		21.750		21.750		21.750		21.750	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						539.538		584.771		634.528		689.261		749.467	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	26	539.538	26	584.771	26	634.528	26	689.261	26	749.467	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	12	2.500	12	2.500	12	2.500	12	2.500	12	2.500	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / WONOSOBO
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						84.700		84.700		84.700		84.700		84.700	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	12	84.700	12	84.700	12	84.700	12	84.700	12	84.700	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / WONOSOBO
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						452.338		497.571		547.328		602.061		662.267	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	2	452.338	2	497.571	2	547.328	2	602.061	2	662.267	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / WONOSOBO
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.226		464.226		464.226		464.226		464.226	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	40	44	464.226	49	464.226	52	464.226	52	464.226	56	464.226	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						182.226		182.226		182.226		182.226		182.226	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	8	182.226	8	182.226	8	182.226	8	182.226	8	182.226	Kasubag Tata Usaha	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000	Kasubag Tata Usaha	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						32.000		32.000		32.000		32.000		32.000	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	N/A	34	32.000	39	32.000	42	32.000	42	32.000	46	32.000	Kasubag Tata Usaha	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Dipelihara/Direhabilitasi														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.767.750		2.680.750		2.892.750		3.121.750		3.307.250	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPJ WIL. Cilacap	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPJ WIL. Cilacap	%	100	100	2.767.750	100	2.680.750	100	2.892.750	100	3.121.750	100	3.307.250	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						89.000		101.500		94.000		79.000		0	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	N/A	14	89.000	19	101.500	16	94.000	10	79.000	N/A	0	Kasubag Tata Usaha	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						89.000		101.500		94.000		79.000		0	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	14	89.000	19	101.500	16	94.000	10	79.000	N/A	0	Kasubag Tata Usaha	BANYUMAS / CILACAP / OPD Provinsi / PURBALINGGA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						433.750		475.750		519.750		570.250		624.250	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Laporan	100	100	433.750	100	475.750	100	519.750	100	570.250	100	624.250	Kasubag Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.500		17.000		19.000		21.000		23.000	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	15.500	1	17.000	1	19.000	1	21.000	1	23.000	Kasubag Tata Usaha	CILACAP / OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						63.500		70.000		77.000		85.000		93.000	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	63.500	1	70.000	1	77.000	1	85.000	1	93.000	Kasubag Tata Usaha	CILACAP / OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						18.000		20.000		21.500		24.000		26.000	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	1	18.000	1	20.000	1	21.500	1	24.000	1	26.000	Kasubag Tata Usaha	CILACAP / OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						53.000		58.500		64.000		70.500		77.500	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	2	53.000	2	58.500	2	64.000	2	70.500	2	77.500	Kasubag Tata Usaha	CILACAP / OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						7.000		7.500		8.000		9.000		10.000	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	672	7.000	672	7.500	672	8.000	672	9.000	672	10.000	Kasubag Tata Usaha	CILACAP / OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						255.000		281.000		308.500		339.000		373.000	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12	255.000	12	281.000	12	308.500	12	339.000	12	373.000	Kasubag Tata Usaha	CILACAP / OPD Provinsi
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						21.750		21.750		21.750		21.750		21.750	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	Kasubag Tata Usaha	CILACAP / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.307.000		1.437.000		1.581.000		1.739.500		1.912.500	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	26	1.307.000	26	1.437.000	26	1.581.000	26	1.739.500	26	1.912.500	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.000		8.500		9.500		10.500		11.500	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	12	8.000	12	8.500	12	9.500	12	10.500	12	11.500	Kasubag Tata Usaha	CILACAP / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						207.000		227.500		250.500		276.000		303.000	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	12	207.000	12	227.500	12	250.500	12	276.000	12	303.000	Kasubag Tata Usaha	CILACAP / OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.092.000		1.201.000		1.321.000		1.453.000		1.598.000	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	2	1.092.000	2	1.201.000	2	1.321.000	2	1.453.000	2	1.598.000	Kasubag Tata Usaha	CILACAP / OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						938.000		666.500		698.000		733.000		770.500	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	66	100	938.000	102	666.500	105	698.000	105	733.000	109	770.500	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						198.000		218.000		240.000		264.000		290.000	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	33	198.000	33	218.000	33	240.000	33	264.000	33	290.000	Kasubag Tata Usaha	CILACAP / OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						650.000		350.000		350.000		350.000		350.000	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	7	650.000	4	350.000	4	350.000	4	350.000	4	350.000	Kasubag Tata Usaha	CILACAP / OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						90.000		98.500		108.000		119.000		130.500	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	60	90.000	65	98.500	68	108.000	68	119.000	72	130.500	Kasubag Tata Usaha	CILACAP / OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						3.580.227		3.759.183		3.928.033		4.128.268		4.291.508	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPJ WIL. Tegal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPJ WIL. Tegal	%	100	100	3.580.227	100	3.759.183	100	3.928.033	100	4.128.268	100	4.291.508	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						185.000		185.000		160.000		150.000		85.000	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	N/A	35	185.000	35	185.000	30	160.000	28	150.000	15	85.000	Kasubag Tata Usaha	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						185.000		185.000		160.000		150.000		85.000	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	35	185.000	35	185.000	30	160.000	28	150.000	15	85.000	Kasubag Tata Usaha	BREBES / OPD Provinsi / PEKALONGAN / PEMALANG / TEGAL

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						558.256		582.512		607.793		634.202		661.833	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	558.256	100	582.512	100	607.793	100	634.202	100	661.833	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						17.425		18.967		20.564		22.221		23.944	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	17.425	1	18.967	1	20.564	1	22.221	1	23.944	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / TEGAL
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						72.945		80.241		88.266		97.093		106.784	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	72.945	1	80.241	1	88.266	1	97.093	1	106.784	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / TEGAL
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.218		33.040		35.944		38.939		42.033	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	1	30.218	1	33.040	1	35.944	1	38.939	1	42.033	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / TEGAL
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						57.945		60.541		63.296		66.226		69.349	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	2	57.945	2	60.541	2	63.296	2	66.226	2	69.349	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / TEGAL

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	1008	5.000	1008	5.000	1008	5.000	1008	5.000	1008	5.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / TEGAL
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						352.973		362.973		372.973		382.973		392.973	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12	352.973	12	362.973	12	372.973	12	382.973	12	392.973	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / TEGAL
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						21.750		21.750		21.750		21.750		21.750	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	1	21.750	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / TEGAL
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.338.406		1.466.748		1.607.324		1.761.358		1.930.195	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	26	1.338.406	26	1.466.748	26	1.607.324	26	1.761.358	26	1.930.195	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.108		13.520		14.972		16.470		18.017	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	12	12.108	12	13.520	12	14.972	12	16.470	12	18.017	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / TEGAL

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						230.200		247.520		266.072		285.980		307.378	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	12	230.200	12	247.520	12	266.072	12	285.980	12	307.378	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / TEGAL
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.096.098		1.205.708		1.326.280		1.458.908		1.604.800	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	2	1.096.098	2	1.205.708	2	1.326.280	2	1.458.908	2	1.604.800	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / TEGAL
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.498.565		1.524.923		1.552.916		1.582.708		1.614.480	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	34	131	1.498.565	141	1.524.923	147	1.552.916	147	1.582.708	155	1.614.480	Kasubag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						278.675		297.043		316.748		337.923		360.716	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	13	278.675	13	297.043	13	316.748	13	337.923	13	360.716	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / TEGAL

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	3	1.150.000	3	1.150.000	3	1.150.000	3	1.150.000	3	1.150.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / TEGAL
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						69.890		77.880		86.168		94.785		103.764	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	115	69.890	125	77.880	131	86.168	131	94.785	139	103.764	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi / TEGAL
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.348.120		1.348.120		1.348.120		1.348.120		1.348.120	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Pemali Comal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Pemali Comal	%	100	100	1.348.120	100	1.348.120	100	1.348.120	100	1.348.120	100	1.348.120	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						277.000		277.000		277.000		277.000		277.000	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	277.000	100	277.000	100	277.000	100	277.000	100	277.000	Sub Bag Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	25.000	2	25.000	2	25.000	2	25.000	2	25.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	24	25.000	24	25.000	24	25.000	24	25.000	24	25.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	4	12.000	4	12.000	4	12.000	4	12.000	4	12.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						175.000		175.000		175.000		175.000		175.000	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	175.000	12	175.000	12	175.000	12	175.000	12	175.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						469.700		469.700		469.700		469.700		469.700	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	12	469.700	12	469.700	12	469.700	12	469.700	12	469.700	Sub Bag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4	1.200	4	1.200	4	1.200	4	1.200	4	1.200	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						276.000		276.000		276.000		276.000		276.000	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4	276.000	4	276.000	4	276.000	4	276.000	4	276.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						192.500		192.500		192.500		192.500		192.500	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4	192.500	4	192.500	4	192.500	4	192.500	4	192.500	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						601.420		601.420		601.420		601.420		601.420	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	88	83	601.420	83	601.420	83	601.420	83	601.420	83	601.420	Sub Bag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						223.420		223.420		223.420		223.420		223.420	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	36	223.420	36	223.420	36	223.420	36	223.420	36	223.420	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	300.000	3	300.000	3	300.000	3	300.000	3	300.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						78.000		78.000		78.000		78.000		78.000	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	46	44	78.000	44	78.000	44	78.000	44	78.000	44	78.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.041.579		2.421.579		2.041.579		2.041.579		2.041.579	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Jratun Seluna	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Jratun Seluna	%	100	100	2.041.579	100	2.421.579	100	2.041.579	100	2.041.579	100	2.041.579	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						329.494		329.494		329.494		329.494		329.494	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	329.494	100	329.494	100	329.494	100	329.494	100	329.494	Sub Bag Tata Usaha	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						44.627		44.627		44.627		44.627		44.627	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	44.627	2	44.627	2	44.627	2	44.627	2	44.627	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						38.550		38.550		38.550		38.550		38.550	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	38.550	4	38.550	4	38.550	4	38.550	4	38.550	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						8.166		8.166		8.166		8.166		8.166	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24	8.166	24	8.166	24	8.166	24	8.166	24	8.166	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						23.151		23.151		23.151		23.151		23.151	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	23.151	4	23.151	4	23.151	4	23.151	4	23.151	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						215.000		215.000		215.000		215.000		215.000	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	215.000	12	215.000	12	215.000	12	215.000	12	215.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						629.620		629.620		629.620		629.620		629.620	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	12	629.620	12	629.620	12	629.620	12	629.620	12	629.620	Sub Bag Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.700		2.700		2.700		2.700		2.700	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	2.700	4	2.700	4	2.700	4	2.700	4	2.700	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						420.176		420.176		420.176		420.176		420.176	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	420.176	4	420.176	4	420.176	4	420.176	4	420.176	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						206.744		206.744		206.744		206.744		206.744	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	206.744	4	206.744	4	206.744	4	206.744	4	206.744	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.082.465		1.462.465		1.082.465		1.082.465		1.082.465	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	88	88	1.082.465	88	1.462.465	88	1.082.465	88	1.082.465	88	1.082.465	Sub Bag Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						272.966		272.966		272.966		272.966		272.966	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	48	272.966	48	272.966	48	272.966	48	272.966	48	272.966	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						620.000		1.000.000		620.000		620.000		620.000	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	5	620.000	5	1.000.000	5	620.000	5	620.000	5	620.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						189.499		189.499		189.499		189.499		189.499	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	98	189.499	98	189.499	98	189.499	98	189.499	98	189.499	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						903.436		903.436		903.436		903.436		903.443	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Bengawan Solo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Bengawan Solo	%	100	100	903.436	100	903.436	100	903.436	100	903.436	100	903.443	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						209.314		209.314		209.314		209.314		209.314	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	209.314	100	209.314	100	209.314	100	209.314	100	209.314	Sub Bag Tata Usaha	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						23.514		23.514		23.514		23.514		23.514	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	23.514	1	23.514	1	23.514	1	23.514	1	23.514	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	12	12	1.800	12	1.800	12	1.800	12	1.800	12	1.800	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Undangan yang Disediakan														
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	7	4	9.000	4	9.000	4	9.000	4	9.000	4	9.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						160.000		160.000		160.000		160.000		160.000	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	4	160.000	4	160.000	4	160.000	4	160.000	4	160.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						298.298		298.298		298.298		298.298		298.303	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	26	298.298	26	298.298	26	298.298	26	298.298	26	298.303	Sub Bag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						849		849		849		849		849	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	12	849	12	849	12	849	12	849	12	849	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						169.400		169.400		169.400		169.400		169.400	DPUPR - BPSDA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	BENGAWAN SOLO	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	169.400	12	169.400	12	169.400	12	169.400	12	169.400	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						128.049		128.049		128.049		128.049		128.054	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	128.049	12	128.049	12	128.049	12	128.049	12	128.054	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						395.824		395.824		395.824		395.824		395.826	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	37	37	395.824	37	395.824	37	395.824	37	395.824	37	395.826	Sub Bag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						120.282		120.282		120.282		120.282		120.282	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	24	120.282	24	120.282	24	120.282	24	120.282	24	120.282	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						75.542		75.542		75.542		75.542		75.544	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	24	75.542	24	75.542	24	75.542	24	75.542	24	75.544	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.424.963		2.824.963		2.424.963		2.424.963		2.424.963	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	100	2.424.963	100	2.824.963	100	2.424.963	100	2.424.963	100	2.424.963	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						491.400		491.400		491.400		491.400		491.400	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	491.400	100	491.400	100	491.400	100	491.400	100	491.400	Sub Bag Tata Usaha	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	45.000	2	45.000	2	45.000	2	45.000	2	45.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						32.400		32.400		32.400		32.400		32.400	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	32.400	4	32.400	4	32.400	4	32.400	4	32.400	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	96	5.000	96	5.000	96	5.000	96	5.000	96	5.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.000		19.000		19.000		19.000		19.000	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	19.000	4	19.000	4	19.000	4	19.000	4	19.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						390.000		390.000		390.000		390.000		390.000	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	4	390.000	4	390.000	4	390.000	4	390.000	4	390.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						950.350		950.350		950.350		950.350		950.350	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	26	950.350	26	950.350	26	950.350	26	950.350	26	950.350	Sub Bag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.450		2.450		2.450		2.450		2.450	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	2.450	12	2.450	12	2.450	12	2.450	12	2.450	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	750.000	12	750.000	12	750.000	12	750.000	12	750.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						197.900		197.900		197.900		197.900		197.900	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	197.900	2	197.900	2	197.900	2	197.900	2	197.900	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						983.213		1.383.213		983.213		983.213		983.213	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	88	88	983.213	88	1.383.213	88	983.213	88	983.213	88	983.213	Sub Bag Tata Usaha	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						174.548		174.548		174.548		174.548		174.548	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	50	174.548	50	174.548	50	174.548	50	174.548	50	174.548	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						600.000		1.000.000		600.000		600.000		600.000	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	6	600.000	6	1.000.000	6	600.000	6	600.000	6	600.000	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						208.665		208.665		208.665		208.665		208.665	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	34	34	208.665	34	208.665	34	208.665	34	208.665	34	208.665	Sub Bag Tata Usaha	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO
Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PE)								207.138.702		255.635.094		358.848.779		397.463.496		396.081.118	DPUPR	
				Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Mantap	%	N/A	48,22	0	48,38	0	48,71	0	49,06	0	49,54	0	DPUPR	
	Terjaganya Kondisi Jalan Mantap							207.138.702		255.635.094		358.848.779		397.463.496		396.081.118	DPUPR	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	%	47,09	48,22	29.827.160	48,38	65.862.603	48,71	163.081.238	49,06	193.805.954	49,54	196.323.576	DPUPR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						11.469.272		41.944.600		138.996.593		170.107.067		177.933.980	DPUPR - BIDANG BINA MARGA	
			Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	N/A	100	1.419.272	100	1.744.600	100	2.316.593	100	2.875.067	100	3.538.943	DPUPR - BIDANG BINA MARGA	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.419.272		1.744.600		2.316.593		2.875.067		3.538.943	DPUPR - BIDANG BINA MARGA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen pengawasan teknis kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Dokumen	N/A	4	1.419.272	10	1.744.600	10	2.316.593	10	2.875.067	10	3.538.943	Pokja Pengawasan	
		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi						1.419.272		1.744.600		2.316.593		2.875.067		3.538.943	DPUPR - BIDANG BINA MARGA	
			Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	Km	N/A	3,35	1.419.272	12	1.744.600	21	2.316.593	22,1	2.875.067	25	3.538.943	Pokja Pengawasan	BANJARNEGARA / BANYUMAS / BATANG / BIDANG BINA MARGA / BLORA / CILACAP / DEMAK / GROBOGAN / KOTA SEMARANG / MAGELANG / PATI /

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		PEKALONGAN / PEMALANG / PURWOREJO / SEMARANG / TEMANGGUNG / WONOSOBO
			Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	Km	N/A	1176,63	10.050.000	1180,63	40.200.000	1188,63	136.680.000	1197,23	167.232.000	1208,73	174.395.037	DPUPR - BIDANG BINA MARGA	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						10.050.000		40.200.000		136.680.000		167.232.000		174.395.037	DPUPR - BIDANG BINA MARGA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor	Km	N/A	1	10.050.000	4	40.200.000	8	136.680.000	8,6	167.232.000	11,5	174.395.037	Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	
		Rekonstruksi Jalan						0		0		0		0		0	DPUPR - BIDANG BINA MARGA	
			Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	BIDANG BINA MARGA / BLORA / DEMAK / GROBOGAN / KOTA SEMARANG / PATI / SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pembangunan Underpass						0		0		0		0		0	DPUPR - BIDANG BINA MARGA	
			Terlaksananya Pembangunan Underpass	Panjang Underpass yang Dibangun	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	DPUPR - BIDANG BINA MARGA
		Pelebaran Jalan Menuju Standar						10.050.000		40.200.000		80.400.000		86.430.000		115.575.000	DPUPR - BIDANG BINA MARGA	
			Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Km	N/A	1	10.050.000	4	40.200.000	8	80.400.000	8,6	86.430.000	11,5	115.575.000	Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	BIDANG BINA MARGA / BLORA / DEMAK / GROBOGAN / KOTA SEMARANG / PATI / SEMARANG
		Pembangunan Jembatan						0		0		56.280.000		80.802.000		58.820.037	DPUPR - BIDANG BINA MARGA	
			Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	175,6	56.280.000	144	80.802.000	210,8	58.820.037	Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	BIDANG BINA MARGA / BLORA / GROBOGAN / SEMARANG / SUKOHARJO
		Pembangunan Flyover						0		0		0		0		0	DPUPR - BIDANG BINA MARGA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pembangunan Flyover	Panjang Flyover yang Dibangun	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	DPUPR - BIDANG BINA MARGA
		Pembangunan Jalan						0		0		0		0		0	DPUPR - BIDANG BINA MARGA	
			Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	DPUPR - BIDANG BINA MARGA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						5.195.000		5.560.000		6.570.000		6.075.000		5.065.000	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	
			Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	%	N/A	100	5.075.000	100	5.450.000	100	6.450.000	100	5.950.000	100	4.950.000	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						5.075.000		5.450.000		6.450.000		5.950.000		4.950.000	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	Dokumen	N/A	2	5.075.000	2	5.450.000	2	6.450.000	2	5.950.000	2	4.950.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						2.725.000		3.100.000		3.100.000		2.600.000		2.600.000	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	N/A	1	2.300.000	1	2.300.000	1	2.300.000	1	2.300.000	1	2.300.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK
			Terselenggarannya pengelolaan aset	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan dan jembatan	m2	N/A	250	425.000	2450	800.000	1200	800.000	200	300.000	200	300.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan						2.350.000		2.350.000		3.350.000		3.350.000		2.350.000	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	
			Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	N/A	2440,12	2.350.000	2440,12	2.350.000	2440,12	3.350.000	2440,12	3.350.000	2440,12	2.350.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK
			Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan yang Dileger	%	N/A	59,76	120.000	60,88	110.000	62,33	120.000	63,88	125.000	65,25	115.000	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						120.000		110.000		120.000		125.000		115.000	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yangDilegerkan S.d Tahun-N (KM)	Km	N/A	1458,29	120.000	1485,65	110.000	1521,04	120.000	1558,84	125.000	1592,24	115.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		Pengelolaan Leger Jalan						120.000		110.000		120.000		125.000		115.000	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	
			Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	N/A	1	120.000	1	110.000	1	120.000	1	125.000	1	115.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						13.162.888		18.358.003		17.514.645		17.623.887		13.324.596	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Terpenuhinya ketersediaan peralatan alat berat pendukung kegiatan perangkat daerah yang disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan	%	N/A	99,81	4.589.888	100	9.355.003	100	8.060.645	100	7.693.887	100	9.103.696	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						4.589.888		9.355.003		8.060.645		7.693.887		9.103.696	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Peralatan yang Tersedia	Unit	N/A	1142	4.589.888	1196	9.355.003	1257	8.060.645	1307	7.693.887	1373	9.103.696	Seksi Peralatan dan Alat Berat	
		Pemeliharaan Rutin Jalan						4.589.888		9.355.003		8.060.645		7.693.887		9.103.696	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	N/A	2440,12	0	2440,12	0	2440,12	0	2440,12	0	2440,12	0	Seksi Peralatan dan Alat Berat	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		BERAT / SEMARANG
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Peralatan bertambah	Unit	N/A	N/A	0	2	2.270.285	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Seksi Peralatan dan Alat Berat	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT / SEMARANG
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Peralatan yang dipelihara (Unit)	Unit	N/A	1079	3.601.970	1079	3.692.270	1081	4.294.070	1081	4.364.270	1081	5.014.670	Seksi Peralatan dan Alat Berat	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT / SEMARANG
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah persediaan bahan/material konstruksipenanganan kerusakan khusus (Unit)	Unit	N/A	1050	987.918	4000	3.392.448	3750	3.766.575	3600	3.329.617	3750	4.089.026	Seksi Peralatan dan Alat Berat	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT / SEMARANG
			Terpenuhinya jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi dalam satu tahun terhadap jumlah kumulatif sertifikat hasil uji tahun rencana	Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi	%	N/A	19,67	8.573.000	39,61	9.003.000	59,7	9.454.000	79,78	9.930.000	100	4.220.900	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						8.573.000		9.003.000		9.454.000		9.930.000		4.220.900	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi (Sertifikat)	Sertifikat	N/A	1430	8.573.000	1450	9.003.000	1460	9.454.000	1460	9.930.000	1470	4.220.900	Seksi Pengujian Mutu	
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi						8.573.000		9.003.000		9.454.000		9.930.000		4.220.900	DPUPR - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
			Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Seksi Pengujian Mutu	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT / SEMARANG
			Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO9001 (Dokumen)	Dokumen	N/A	2	475.000	2	499.000	2	524.000	2	551.000	2	578.550	Seksi Pengujian Mutu	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT / SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemeliharaan alat uji (Unit)	Unit	N/A	116	226.000	118	238.000	120	250.000	122	263.000	125	276.150	Seksi Pengujian Mutu	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT / SEMARANG
			Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Jumlah penambahan alat uji (Unit)	Unit	N/A	2	6.700.000	2	7.035.000	2	7.387.000	2	7.757.000	1	1.939.250	Seksi Pengujian Mutu	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT / SEMARANG
			Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu (Orang)	Orang	N/A	60	715.000	60	751.000	60	789.000	60	829.000	60	870.450	Seksi Pengujian Mutu	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT / SEMARANG
			Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi (Sertifikat)	Sertifikat	N/A	1430	457.000	1450	480.000	1460	504.000	1460	530.000	1470	556.500	Seksi Pengujian Mutu	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT / SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap	%	61,56	63,22	155.696.200	63,38	155.357.200	63,55	155.057.200	63,69	154.907.200	63,85	155.027.200	DPUPR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						19.324.200		19.264.200		19.204.200		19.024.200		19.264.200	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Semarang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Semarang	%	N/A	64,26	19.324.200	64,42	19.264.200	64,59	19.204.200	64,75	19.024.200	64,92	19.264.200	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						19.324.200		19.264.200		19.204.200		19.024.200		19.264.200	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Semarang	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Semarang	Km	190,8	194,1	19.324.200	194,6	19.264.200	195,1	19.204.200	195,6	19.024.200	196,1	19.264.200	Pokja Wilayah I	
		Pemeliharaan Rutin Jalan						19.324.200		19.264.200		19.204.200		19.024.200		19.264.200	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	N/A	302,07	19.324.200	301,07	19.264.200	300,07	19.204.200	295,07	19.024.200	300,07	19.264.200	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SEMARANG / BATANG / DEMAK / KENDAL / SEMARANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						15.885.600		15.885.600		15.825.600		15.825.600		15.825.600	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Pati	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Pati	%	N/A	69,73	15.885.600	69,93	15.885.600	70,13	15.825.600	70,33	15.825.600	70,53	15.825.600	DPUPR - BPJ WIL. PATI	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						15.885.600		15.885.600		15.825.600		15.825.600		15.825.600	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Pati	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Pati	Km	165,73	173,49	15.885.600	173,99	15.885.600	174,49	15.825.600	174,99	15.825.600	175,49	15.825.600	Pokja Wilayah I	
		Pemeliharaan Rutin Jalan						15.885.600		15.885.600		15.825.600		15.825.600		15.825.600	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	N/A	246,82	15.885.600	246,82	15.885.600	244,82	15.825.600	246,82	15.825.600	245,82	15.825.600	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PATI / JEPARA / KEBUMEN / KUDUS / PATI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						24.040.400		24.001.400		23.941.400		24.031.400		23.971.400	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Purwodadi	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Purwodadi	%	N/A	50,21	24.040.400	50,34	24.001.400	50,47	23.941.400	50,6	24.031.400	50,73	23.971.400	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						24.040.400		24.001.400		23.941.400		24.031.400		23.971.400	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	344,19	348,56	24.040.400	349,06	24.001.400	349,56	23.941.400	350,06	24.031.400	350,56	23.971.400	Pokja Wilayah I	
		Pemeliharaan Rutin Jalan						24.040.400		24.001.400		23.941.400		24.031.400		23.971.400	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	N/A	383,79	24.040.400	383,14	24.001.400	380,14	23.941.400	381,64	24.031.400	380,64	23.971.400	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PURWODADI / BLORA / GROBOGAN / SRAGEN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						25.866.600		25.866.600		25.806.600		25.806.600		25.806.600	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Surakarta	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Surakarta	%	N/A	65,3	25.866.600	65,42	25.866.600	65,54	25.806.600	65,66	25.806.600	65,78	25.806.600	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						25.866.600		25.866.600		25.806.600		25.806.600		25.806.600	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Km	380,92	382,74	25.866.600	383,24	25.866.600	383,74	25.806.600	384,24	25.806.600	384,74	25.806.600	Pokja Wilayah I	
		Pemeliharaan Rutin Jalan						25.866.600		25.866.600		25.806.600		25.806.600		25.806.600	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	N/A	414,98	25.866.600	414,98	25.866.600	413,98	25.806.600	413,98	25.806.600	413,98	25.806.600	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SURAKARTA / BOYOLALI / KARANGANYAR / KLATEN / SUKOHARJO / WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						17.064.800		17.004.800		17.004.800		17.004.800		17.004.800	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Magelang	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Magelang	%	N/A	73,21	17.064.800	73,4	17.004.800	73,59	17.004.800	73,59	17.004.800	73,78	17.004.800	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						17.064.800		17.004.800		17.004.800		17.004.800		17.004.800	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Magelang	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Magelang	Km	N/A	190,43	17.064.800	190,93	17.004.800	191,43	17.004.800	191,43	17.004.800	191,93	17.004.800	Pokja Wilayah I	
		Pemeliharaan Rutin Jalan						17.064.800		17.004.800		17.004.800		17.004.800		17.004.800	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	N/A	260,13	17.064.800	258,13	17.004.800	259,13	17.004.800	259,13	17.004.800	257,13	17.004.800	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. MAGELANG / KEBUMEN / MAGELANG / PURWOREJO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						16.313.600		16.253.600		16.193.600		16.253.600		16.193.600	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Wonosobo	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Wonosobo	%	N/A	58,71	16.313.600	58,91	16.253.600	59,12	16.193.600	59,32	16.253.600	59,52	16.193.600	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						16.313.600		16.253.600		16.193.600		16.253.600		16.193.600	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	N/A	145,12	16.313.600	145,62	16.253.600	146,12	16.193.600	146,62	16.253.600	147,12	16.193.600	Pokja Wilayah I	
		Pemeliharaan Rutin Jalan						16.313.600		16.253.600		16.193.600		16.253.600		16.193.600	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	N/A	247,17	16.313.600	246,17	16.253.600	245,17	16.193.600	244,17	16.253.600	245,17	16.193.600	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. WONOSOBO / BANJARNEGARA / TEMANGGUNG / WONOSOBO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						13.243.400		13.183.400		13.183.400		13.123.400		13.123.400	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Cilacap	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Cilacap	%	N/A	74,93	13.243.400	75,17	13.183.400	75,41	13.183.400	75,65	13.123.400	76,9	13.123.400	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						13.243.400		13.183.400		13.183.400		13.123.400		13.123.400	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJWilayah Cilacap	Km	N/A	154,24	13.243.400	154,74	13.183.400	155,24	13.183.400	155,74	13.123.400	156,24	13.123.400	Pokja Wilayah I	
		Pemeliharaan Rutin Jalan						13.243.400		13.183.400		13.183.400		13.123.400		13.123.400	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	N/A	205,85	13.243.400	202,85	13.183.400	202,85	13.183.400	203,85	13.123.400	203,85	13.123.400	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. CILACAP / BANYUMAS / CILACAP /

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		PURBALINGGA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						23.957.600		23.897.600		23.897.600		23.837.600		23.837.600	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Tegal	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Tegal	%	N/A	58,71	23.957.600	58,84	23.897.600	58,97	23.897.600	59,1	23.837.600	59,24	23.837.600	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						23.957.600		23.897.600		23.897.600		23.837.600		23.837.600	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Tegal	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Tegal	Km	N/A	220,71	23.957.600	221,21	23.897.600	221,71	23.897.600	222,21	23.837.600	222,71	23.837.600	Pokja Wilayah I	
		Pemeliharaan Rutin Jalan						23.957.600		23.897.600		23.897.600		23.837.600		23.837.600	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	N/A	375,96	23.957.600	374,96	23.897.600	372,96	23.897.600	371,36	23.837.600	368,46	23.837.600	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. TEGAL / BREBES / PEKALONGAN / PEMALANG / TEGAL
				Persentase Panjang Jaian Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	91,46	93,12	21.615.342	93,29	34.415.291	93,45	40.710.341	93,59	48.750.342	93,76	44.730.342	DPUPR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						1.503.193		3.513.193		5.523.193		11.553.193		3.513.193	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Semarang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Semarang	%	93,31	94,62	1.503.193	94,79	3.513.193	94,95	5.523.193	95,12	11.553.193	95,28	3.513.193	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.503.193		3.513.193		5.523.193		11.553.193		3.513.193	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	Km	282,53	285,82	0	286,32	2.010.000	286,82	4.020.000	287,32	10.050.000	287,82	2.010.000	Pokja Wilayah I	
		Rehabilitasi Jalan						0		2.010.000		4.020.000		10.050.000		2.010.000	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	N/A	N/A	0	1	2.010.000	2	4.020.000	5	10.050.000	1	2.010.000	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SEMARANG / BATANG / DEMAK / KENDAL / SEMARANG
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SEMARANG / BATANG / DEMAK / KENDAL / SEMARANG
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SEMARANG / BATANG / DEMAK / KENDAL / SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	Unit	N/A	270	1.503.193	270	1.503.193	270	1.503.193	270	1.503.193	270	1.503.193	Pokja Wilayah I	
		Pelebaran Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SEMARANG / BATANG / DEMAK / KENDAL / SEMARANG
		Rehabilitasi Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SEMARANG / BATANG / DEMAK / KENDAL / SEMARANG
		Pemeliharaan Rutin Jembatan						1.503.193		1.503.193		1.503.193		1.503.193		1.503.193	DPUPR - BPJ WIL. SEMARANG	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	N/A	2614,25	1.503.193	2614,25	1.503.193	2614,25	1.503.193	2614,25	1.503.193	2614,25	1.503.193	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SEMARANG / BATANG / DEMAK / KENDAL / SEMARANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						3.437.696		3.437.696		5.447.696		5.447.696		5.447.696	DPUPR - BPJ WIL. PATI	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Pati	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Pati	%	88,11	91,23	3.437.696	91,43	3.437.696	91,63	5.447.696	91,83	5.447.696	92,03	5.447.696	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						3.437.696		3.437.696		5.447.696		5.447.696		5.447.696	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati	Km	219,23	226,99	2.010.000	227,49	2.010.000	227,99	4.020.000	228,49	4.020.000	228,99	4.020.000	Pokja Wilayah I	
		Rehabilitasi Jalan						2.010.000		2.010.000		4.020.000		4.020.000		4.020.000	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	N/A	1	2.010.000	1	2.010.000	2	4.020.000	2	4.020.000	2	4.020.000	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PATI / JEPARA / KUDUS / PATI / REMBANG
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PATI / JEPARA / KUDUS / PATI / REMBANG
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PATI / JEPARA / KUDUS / PATI / REMBANG
			Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati	Unit	N/A	212	1.427.696	212	1.427.696	212	1.427.696	212	1.427.696	212	1.427.696	Pokja Wilayah I	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pelebaran Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PATI / JEPARA / KUDUS / PATI / REMBANG
		Rehabilitasi Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PATI / JEPARA / KUDUS / PATI / REMBANG
		Pemeliharaan Rutin Jembatan						1.427.696		1.427.696		1.427.696		1.427.696		1.427.696	DPUPR - BPJ WIL. PATI	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	N/A	2482,95	1.427.696	2482,95	1.427.696	2482,95	1.427.696	2482,95	1.427.696	2482,95	1.427.696	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PATI / JEPARA / KUDUS / PATI / REMBANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						5.132.253		7.882.203		6.137.253		6.137.253		8.147.253	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Purwodadi	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Purwodadi	%	89,6	90,74	5.132.253	90,87	7.882.203	91	6.137.253	91,13	6.137.253	91,26	8.147.253	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						5.132.253		7.882.203		6.137.253		6.137.253		8.147.253	DPUPR - BPJ WIL.	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	PURWODADI	
			Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	188,51	192,88	3.015.000	193,38	3.015.000	193,88	4.020.000	194,38	4.020.000	194,88	6.030.000	Pokja Wilayah I	
		Rehabilitasi Jalan						3.015.000		3.015.000		4.020.000		4.020.000		6.030.000	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	N/A	0,35	3.015.000	1	3.015.000	2	4.020.000	0,5	4.020.000	1,5	6.030.000	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PURWODADI / BLORA / GROBOGAN / SRAGEN
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PURWODADI / BLORA / GROBOGAN / SRAGEN
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PURWODADI / BLORA / GROBOGAN / SRAGEN
			Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi	Unit	N/A	314	2.117.253	314	4.867.203	314	2.117.253	314	2.117.253	314	2.117.253	Pokja Wilayah I	
		Pelebaran Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PURWODADI / BLORA / GROBOGAN / SRAGEN
		Rehabilitasi Jembatan						0		2.763.750		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	N/A	N/A	0	24	2.763.750	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PURWODADI / BLORA / GROBOGAN / SRAGEN
		Pemeliharaan Rutin Jembatan						2.117.253		2.103.453		2.117.253		2.117.253		2.117.253	DPUPR - BPJ WIL. PURWODADI	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	N/A	3682,18	2.117.253	3658,18	2.103.453	3682,18	2.117.253	3682,18	2.117.253	3682,18	2.117.253	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. PURWODADI / BLORA / GROBOGAN / SRAGEN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						4.851.995		4.851.994		6.861.994		6.861.995		6.861.995	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Surakarta	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Surakarta	%	91,57	92,01	4.851.995	92,13	4.851.994	92,25	6.861.994	92,37	6.861.995	92,49	6.861.995	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						4.851.995		4.851.994		6.861.994		6.861.995		6.861.995	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Km	269,82	271,64	2.010.000	272,14	2.010.000	272,64	4.020.000	273,14	4.020.000	273,64	4.020.000	Pokja Wilayah I	
		Rehabilitasi Jalan						2.010.000		2.010.000		4.020.000		4.020.000		4.020.000	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	N/A	1	2.010.000	1	2.010.000	2	4.020.000	2	4.020.000	2	4.020.000	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SURAKARTA / BOYOLALI / KARANGANYAR / KLATEN / SUKOHARJO / WONOGIRI
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SURAKARTA / BOYOLALI / KARANGANYAR / KLATEN / SUKOHARJO / WONOGIRI
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SURAKARTA / BOYOLALI / KARANGANYAR / KLATEN / SUKOHAR

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		JO / WONOGIRI
			Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta	Unit	N/A	371	2.841.995	371	2.841.994	371	2.841.994	371	2.841.995	371	2.841.995	Pokja Wilayah I	
		Pelebaran Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SURAKARTA / BOYOLALI / KARANGANYAR / KLATEN / SUKOHARJO / WONOGIRI
		Rehabilitasi Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SURAKARTA / BOYOLALI / KARANGANYAR / KLATEN / SUKOHARJO / WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan Rutin Jembatan						2.841.995		2.841.994		2.841.994		2.841.995		2.841.995	DPUPR - BPJ WIL. SURAKARTA	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	N/A	4942,6	2.841.995	4942,6	2.841.994	4942,6	2.841.994	4942,6	2.841.995	4942,6	2.841.995	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. SURAKARTA / BOYOLALI / KARANGANYAR / KLATEN / SUKOHARJO / WONOGIRI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						1.244.760		3.254.760		3.254.760		3.254.760		3.254.760	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Magelang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Magelang	%	92,29	93,98	1.244.760	94,17	3.254.760	94,36	3.254.760	94,36	3.254.760	94,55	3.254.760	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.244.760		3.254.760		3.254.760		3.254.760		3.254.760	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang	Km	N/A	244,46	0	244,96	2.010.000	245,46	2.010.000	245,46	2.010.000	245,96	2.010.000	Pokja Wilayah I	
		Rehabilitasi Jalan						0		2.010.000		2.010.000		2.010.000		2.010.000	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	N/A	N/A	0	1	2.010.000	1	2.010.000	1	2.010.000	1	2.010.000	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. MAGELANG / KEBUMEN / MAGELAN

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		G / PURWOREJO
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. MAGELANG / KEBUMEN / MAGELANG / PURWOREJO
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. MAGELANG / KEBUMEN / MAGELANG / PURWOREJO
			Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang	Unit	N/A	220	1.244.760	220	1.244.760	220	1.244.760	220	1.244.760	220	1.244.760	Pokja Wilayah I	
		Pelebaran Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. MAGELANG / KEBUMEN / MAGELANG / PURWOREJO
		Rehabilitasi Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. MAGELANG / KEBUMEN / MAGELANG / PURWOREJO
		Pemeliharaan Rutin Jembatan						1.244.760		1.244.760		1.244.760		1.244.760		1.244.760	DPUPR - BPJ WIL. MAGELANG	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	N/A	2164,8	1.244.760	2164,8	1.244.760	2164,8	1.244.760	2164,8	1.244.760	2164,8	1.244.760	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. MAGELANG / KEBUMEN / MAGELANG / PURWOREJO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						1.002.610		3.012.610		5.022.610		3.012.610		5.022.610	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Wonosobo	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Wonosobo	%	92,5	93,71	1.002.610	93,91	3.012.610	94,11	5.022.610	94,32	3.012.610	94,52	5.022.610	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						1.002.610		3.012.610		5.022.610		3.012.610		5.022.610	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	N/A	231,62	0	232,12	2.010.000	232,62	4.020.000	233,12	2.010.000	233,62	4.020.000	Pokja Wilayah I	
		Rehabilitasi Jalan						0		2.010.000		4.020.000		2.010.000		4.020.000	DPUPR - BPJ WIL.	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	WONOSOBO	
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	N/A	N/A	0	1	2.010.000	2	4.020.000	1	2.010.000	2	4.020.000	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. WONOSOBO / BANJARNEGARA / TEMANGGUNG / WONOSOBO
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. WONOSOBO / BANJARNEGARA / TEMANGGUNG / WONOSOBO
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. WONOSOBO / BANJARNEGARA / TEMANGGUNG / WONOSOBO
			Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo	Unit	N/A	175	1.002.610	175	1.002.610	175	1.002.610	175	1.002.610	175	1.002.610	Pokja Wilayah I	
		Pelebaran Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. WONOSOBO / BANJARNEGARA /

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		TEMANGGUNG / WONOSOBO
		Rehabilitasi Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. WONOSOBO / BANJARNEGARA / TEMANGGUNG / WONOSOBO
		Pemeliharaan Rutin Jembatan						1.002.610		1.002.610		1.002.610		1.002.610		1.002.610	DPUPR - BPJ WIL. WONOSOBO	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	N/A	1743,67	1.002.610	1743,67	1.002.610	1743,67	1.002.610	1743,67	1.002.610	1743,67	1.002.610	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. WONOSOBO / BANJARNEGARA / TEMANGGUNG / WONOSOBO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						2.079.746		4.089.746		4.089.746		6.099.746		6.099.746	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Cilacap	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Cilacap	%	91,86	94,89	2.079.746	95,13	4.089.746	95,37	4.089.746	95,62	6.099.746	95,86	6.099.746	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						2.079.746		4.089.746		4.089.746		6.099.746		6.099.746	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap	Km	N/A	195,33	0	195,83	2.010.000	196,33	2.010.000	195,83	4.020.000	197,33	4.020.000	Pokja Wilayah I	
		Rehabilitasi Jalan						0		2.010.000		2.010.000		4.020.000		4.020.000	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	N/A	N/A	0	1	2.010.000	1	2.010.000	2	4.020.000	2	4.020.000	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. CILACAP / BANYUMAS / CILACAP / PURBALINGGA
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. CILACAP / BANYUMAS / CILACAP / PURBALINGGA
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. CILACAP / BANYUMAS / CILACAP / PURBALINGGA
			Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap	Unit	N/A	172	2.079.746	172	2.079.746	172	2.079.746	172	2.079.746	172	2.079.746	Pokja Wilayah I	
		Pelebaran Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. CILACAP / BANYUMAS / CILACAP /

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		PURBALINGGA
		Rehabilitasi Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. CILACAP / BANYUMAS / CILACAP / PURBALINGGA
		Pemeliharaan Rutin Jembatan						2.079.746		2.079.746		2.079.746		2.079.746		2.079.746	DPUPR - BPJ WIL. CILACAP	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	N/A	2677,82	2.079.746	2677,82	2.079.746	2677,82	2.079.746	2677,82	2.079.746	2677,82	2.079.746	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. CILACAP / BANYUMAS / CILACAP / PURBALINGGA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						2.363.089		4.373.089		4.373.089		6.383.089		6.383.089	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Tegal	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja BPJ WIL. Tegal	%	93,65	94,9	2.363.089	95,04	4.373.089	95,17	4.373.089	95,3	6.383.089	95,44	6.383.089	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						2.363.089		4.373.089		4.373.089		6.383.089		6.383.089	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal	Km	N/A	356,8	0	357,3	2.010.000	357,8	2.010.000	358,3	4.020.000	358,8	4.020.000	Pokja Wilayah I	
		Rehabilitasi Jalan						0		2.010.000		2.010.000		4.020.000		4.020.000	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	N/A	N/A	0	1	2.010.000	1	2.010.000	2	4.020.000	2	4.020.000	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. TEGAL / BREBES / PEKALONGAN / PEMALANG / TEGAL
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Tegal (KM)	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. TEGAL / BREBES / PEKALONGAN / PEMALANG / TEGAL
			Terehabilitasinya Jalan	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Tegal (KM)	Km	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. TEGAL / BREBES / PEKALONGAN / PEMALANG / TEGAL
			Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Tegal	Unit	N/A	346	2.363.089	346	2.363.089	346	2.363.089	346	2.363.089	346	2.363.089	Pokja Wilayah I	
		Pelebaran Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. TEGAL / BREBES / PEKALONGAN / PEMALANG / TEGAL
		Rehabilitasi Jembatan						0		0		0		0		0	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. TEGAL / BREBES / PEKALON

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		GAN / PEMALANG / TEGAL
		Pemeliharaan Rutin Jembatan						2.363.089		2.363.089		2.363.089		2.363.089		2.363.089	DPUPR - BPJ WIL. TEGAL	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	N/A	4109,72	2.363.089	4109,72	2.363.089	4109,72	2.363.089	4109,72	2.363.089	4109,72	2.363.089	Pokja Wilayah I	BPJ WIL. TEGAL / BREBES / PEKALONGAN / PEMALANG / TEGAL
Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (IKLH)								174.560.465		322.834.724		340.382.283		524.777.264		704.796.152	DPUPR	
				Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	N/A	41,91	0	47,26	0	51,54	0	56,11	0	59,05	0	DPUPR	
				Persentase Tingkat Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air	%	66,53	67,69	0	67,78	0	67,92	0	68,06	0	68,19	0	DPUPR	
				Persentase Keterwujudan Penataan Ruang	%	62,29	63,65	0	69,29	0	74,69	0	79,5	0	83,84	0	DPUPR	
	Meningkatnya Pengelolaan SDA							152.200.690		234.372.671		284.680.165		377.582.977		452.000.522	DPUPR	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase Penyediaan Rencana Teknis terhadap Rencana Pembangunan Infrastruktur SDA	%	61,31	62,7	21.896.288	62,7	22.381.924	62,7	29.037.311	62,7	33.993.871	62,7	35.564.817	DPUPR	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						7.790.800		7.571.160		13.486.007		17.665.000		18.419.500	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	
			Tercapainya Penyusunan Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDA terhadap kebutuhan Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air	%	N/A	100	7.790.800	100	7.571.160	100	13.486.007	100	17.665.000	100	18.419.500	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						5.040.800		4.771.160		10.431.007		14.590.000		15.269.500	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	
			Tersedianya Data dan Dokumen Perencanaan serta Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA	Dokumen	N/A	4	3.450.000	3	3.130.360	6	8.431.007	13	12.540.000	14	13.167.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						1.200.000		1.220.029		6.662.659		6.600.000		6.930.000	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	4	2	1.200.000	1	1.220.029	4	6.662.659	5	6.600.000	5	6.930.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai						2.250.000		1.910.331		1.768.348		5.940.000		6.237.000	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	N/A	2	2.250.000	2	1.910.331	2	1.768.348	8	5.940.000	9	6.237.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK
			Meningkatnya Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi dan Pengelolaan Aset	Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi dan Pengelolaan Aset	Dokumen	N/A	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.050.000	2	1.102.500	Seksi Pengelolaan Aset	
		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.050.000		1.102.500	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	11	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.050.000	4	1.102.500	Seksi Pengelolaan Aset	BIDANG BINA TEKNIK
			Tersedianya Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	2	2	590.800	2	640.800	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi	
		Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)						590.800		640.800		1.000.000		1.000.000		1.000.000	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	
			Meningkatnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit	1	1	590.800	1	640.800	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2.750.000		2.800.000		3.055.000		3.075.000		3.150.000	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	
			Tersedianya Data dan Dokumen Perencanaan Teknis Irigasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi	Dokumen	N/A	5	2.750.000	4	2.800.000	4	3.055.000	4	3.075.000	4	3.150.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						2.750.000		2.800.000		3.055.000		3.075.000		3.150.000	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	2	5	2.750.000	4	2.800.000	4	3.055.000	4	3.075.000	4	3.150.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	DPUPR - BIDANG BINA TEKNIK
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						3.880.986		4.075.036		4.278.788		4.492.728		4.717.365	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	%	100	100	3.880.986	100	4.075.036	100	4.278.788	100	4.492.728	100	4.717.365	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.880.986		4.075.036		4.278.788		4.492.728		4.717.365	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Tersedianya dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	5	3.880.986	5	4.075.036	5	4.278.788	5	4.492.728	5	4.717.365	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi						3.880.986		4.075.036		4.278.788		4.492.728		4.717.365	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	5	3.880.986	5	4.075.036	5	4.278.788	5	4.492.728	5	4.717.365	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						4.360.792		4.578.832		4.807.774		5.048.163		5.300.572	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	%	100	100	4.360.792	100	4.578.832	100	4.807.774	100	5.048.163	100	5.300.572	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						4.360.792		4.578.832		4.807.774		5.048.163		5.300.572	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Tersedianya dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	5	4.360.792	5	4.578.832	5	4.807.774	5	5.048.163	5	5.300.572	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi						4.360.792		4.578.832		4.807.774		5.048.163		5.300.572	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	5	4.360.792	5	4.578.832	5	4.807.774	5	5.048.163	5	5.300.572	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						2.422.500		2.543.625		2.670.807		2.804.348		2.944.566	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	%	100	100	2.422.500	100	2.543.625	100	2.670.807	100	2.804.348	100	2.944.566	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2.422.500		2.543.625		2.670.807		2.804.348		2.944.566	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Tersedianya dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	5	2.422.500	5	2.543.625	5	2.670.807	5	2.804.348	5	2.944.566	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi						2.422.500		2.543.625		2.670.807		2.804.348		2.944.566	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO
			Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pedayagunaan SDA di BPSDA Bengawan Solo	Dokumen	5	5	2.422.500	5	2.543.625	5	2.670.807	5	2.804.348	5	2.944.566	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	BPSDA BENGAWAN SOLO
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						3.441.210		3.613.271		3.793.935		3.983.632		4.182.814	DPUPR - BPSDA SERAYU	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	BOGOWONTO	
			Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	100	3.441.210	100	3.613.271	100	3.793.935	100	3.983.632	100	4.182.814	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.441.210		3.613.271		3.793.935		3.983.632		4.182.814	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Tersedianya dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	5	3.441.210	5	3.613.271	5	3.793.935	5	3.983.632	5	4.182.814	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi						3.441.210		3.613.271		3.793.935		3.983.632		4.182.814	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO
			Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pedayagunaan SDA di BPSDA Serayu Bogowonto	Dokumen	5	5	3.441.210	5	3.613.271	5	3.793.935	5	3.983.632	5	4.182.814	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Angka	67,5	69,03	53.024.800	69,17	57.918.199	69,47	81.832.153	69,77	127.439.814	70,07	155.886.257	DPUPR	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						15.527.316		18.545.840		40.491.175		79.422.246		105.467.808	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
			Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	%	69,11	70,44	15.527.316	70,74	18.545.840	71,04	40.491.175	71,34	79.422.246	71,64	105.467.808	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						15.527.316		18.545.840		40.491.175		79.422.246		105.467.808	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
			Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	3	245.840	3	245.840	3	245.840	3	258.132	3	271.039	Pokja Pemberdayaan Kelembagaan	
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi						245.840		245.840		245.840		258.132		271.039	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
			Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	1	2	245.840	2	245.840	2	245.840	2	258.132	2	271.039	Pokja Pemberdayaan Kelembagaan	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah DI yang direhab	Daerah	23	13	14.681.476	15	17.500.000	25	39.445.335	30	78.324.114	35	104.314.769	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						14.681.476		17.500.000		39.445.335		78.324.114		104.314.769	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	2,65	3	14.681.476	4	17.500.000	8	39.445.335	16	78.324.114	22	104.314.769	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
			Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi	Dokumen	2	2	600.000	2	800.000	2	800.000	2	840.000	2	882.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air						600.000		800.000		800.000		840.000		882.000	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
			Rencana Alokasi Air yang Ditetapkan	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	Dokumen	2	2	600.000	2	800.000	2	800.000	2	840.000	2	882.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						7.631.399		8.012.969		8.413.618		13.440.202		14.112.213	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Angka	62,68	64,65	7.631.399	64,95	8.012.969	65,25	8.413.618	65,55	13.440.202	65,85	14.112.213	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						7.631.399		8.012.969		8.413.618		13.440.202		14.112.213	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Mempertahankan kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA	%	60,33	60,39	7.631.399	60,39	8.012.969	60,39	8.413.618	60,39	13.440.202	60,39	14.112.213	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						7.631.399		8.012.969		8.413.618		13.440.202		14.112.213	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	202,39	202,39	7.631.399	202,39	8.012.969	202,39	8.413.618	202,39	13.440.202	202,39	14.112.213	Pokja Operasi dan Pemeliharan	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						11.401.789		11.971.879		12.570.473		13.198.997		13.858.947	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Angka	67,33	68,4	11.401.789	68,7	11.971.879	69	12.570.473	69,3	13.198.997	69,6	13.858.947	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						11.401.789		11.971.879		12.570.473		13.198.997		13.858.947	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Mempertahankan kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA	%	64,98	67,05	11.401.789	67,39	11.971.879	67,73	12.570.473	68,08	13.198.997	68,42	13.858.947	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						11.401.789		11.971.879		12.570.473		13.198.997		13.858.947	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	408,808	408,808	11.401.789	408,808	11.971.879	408,808	12.570.473	408,808	13.198.997	408,808	13.858.947	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						8.596.296		9.026.111		9.477.417		9.954.925		10.452.672	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Angka	67,35	68,99	8.596.296	69,29	9.026.111	69,56	9.477.417	69,89	9.954.925	70,19	10.452.672	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						8.596.296		9.026.111		9.477.417		9.954.925		10.452.672	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Mempertahankan kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA	%	72,99	73,03	8.596.296	73,04	9.026.111	73,05	9.477.417	73,06	9.954.925	73,07	10.452.672	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						8.596.296		9.026.111		9.477.417		9.954.925		10.452.672	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	419,42	419,42	8.596.296	419,42	9.026.111	419,42	9.477.417	419,42	9.954.925	419,42	10.452.672	Pokja Operasi dan Pemeliharan	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						9.868.000		10.361.400		10.879.470		11.423.444		11.994.617	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Angka	72,65	73,45	9.868.000	73,75	10.361.400	74,05	10.879.470	74,35	11.423.444	74,65	11.994.617	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						9.868.000		10.361.400		10.879.470		11.423.444		11.994.617	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Mempertahankan kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA	Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA	%	72,65	73,45	9.868.000	73,75	10.361.400	74,05	10.879.470	74,35	11.423.444	74,65	11.994.617	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						9.868.000		10.361.400		10.879.470		11.423.444		11.994.617	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	326,51	326,51	9.868.000	326,51	10.361.400	326,51	10.879.470	326,51	11.423.444	326,51	11.994.617	Pokja Operasi dan Pemeliharan	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air	%	70,78	71,35	77.279.602	71,47	154.072.548	71,59	173.810.701	71,69	216.149.292	71,79	260.549.448	DPUPR	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						10.575.000		10.467.651		12.075.000		35.400.677		36.185.188	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
			Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	64,31	66,07	4.750.000	66,33	4.642.651	66,58	6.250.000	66,83	14.534.427	67,09	15.275.625	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						4.750.000		4.642.651		6.250.000		14.534.427		15.275.625	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
			Meningkatnya jumlah Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun	Persentase Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang direhab	%	0,011	0,022	4.500.000	0,02	4.392.651	0,02	6.000.000	0,02	14.271.927	0,02	15.000.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		Rehabilitasi Embung						4.500.000		4.392.651		6.000.000		14.271.927		15.000.000	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
			Terehabilitasinya Embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	Unit	1	2	4.500.000	2	4.392.651	5	6.000.000	9	14.271.927	13	15.000.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya Persentase Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau	Persentase Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau	%	N/A	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	262.500	100	275.625	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku						250.000		250.000		250.000		262.500		275.625	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
			Beroperasi dan terpeliharanya unit air baku	Jumlah unit air baku yang dioperasi dan dipelihara	Unit	93	101	0	102	0	103	0	104	0	108	0	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
			Terlaksananya evaluasi dan pemantauan embung dan penampung air lainnya	Jumlah Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau	Unit	93	101	250.000	102	250.000	103	250.000	104	262.500	108	275.625	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
			Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi	m3	2501470,8	2688058,6	5.825.000	2698058,6	5.825.000	2708058,6	5.825.000	2718058,6	20.866.250	2728058,6	20.909.563	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						5.825.000		5.825.000		5.825.000		20.866.250		20.909.563	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
			Meningkatnya jumlah Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun	jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama	Dokumen	2	2	825.000	2	825.000	2	825.000	2	866.250	2	909.563	Pokja Pemberdayaan Kelembagaan	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi						825.000		825.000		825.000		866.250		909.563	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	2	2	825.000	2	825.000	2	825.000	2	866.250	2	909.563	Pokja Pemberdayaan Kelembagaan	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
			Meningkatnya jumlah Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun	Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun	Unit	93	102	5.000.000	103	5.000.000	104	5.000.000	108	20.000.000	112	20.000.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		Pembangunan Embung						5.000.000		5.000.000		5.000.000		20.000.000		20.000.000	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
			Terbangunnya Embung untuk fungsi konservasi dan penyediaan air baku	Jumlah Embung yang dibangun	Unit	N/A	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	DPUPR - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						52.488.851		126.988.851		144.288.851		157.263.294		199.704.671	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI	
			Meningkatnya kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	%	52,37	52,42	52.488.851	52,46	126.988.851	52,5	144.288.851	52,54	157.263.294	52,58	199.704.671	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	N DAN PANTAI	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						52.488.851		126.988.851		144.288.851		157.263.294		199.704.671	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI	
			Meningkatnya panjang sarpras sungai dan pantai yang terbangun	akumulasi panjang sarpras sungai dan pantai terbangun	Km	3,3	8,2	40.300.000	12,35	114.600.000	13,02	129.100.000	18,32	141.800.000	22,86	183.963.211	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		Pembangunan Tanggul Sungai						18.700.000		13.000.000		17.500.000		65.000.000		81.963.211	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI	
			Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Km	3,3	2,8	18.700.000	1,94	13.000.000	2,62	17.500.000	9,72	65.000.000	12,26	81.963.211	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
		Normalisasi/Restorasi Sungai						1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.800.000		2.000.000	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI	
			Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	2,3	1,4	1.600.000	1,4	1.600.000	1,4	1.600.000	1,6	1.800.000	1,6	2.000.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
		Pembangunan Check Dam						0		0		0		0		0	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	N DAN PANTAI	
			Terbangunnya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
		Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai						20.000.000		100.000.000		110.000.000		75.000.000		100.000.000	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI	
			Terbangunnya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	Km	N/A	4	20.000.000	9	100.000.000	9	110.000.000	7	75.000.000	9	100.000.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam konservasi SDA	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Kegiatan	1	1	784.139	1	784.139	1	784.139	1	823.346	1	864.514	Pokja Bina Operasi dan Pemeliharaan	
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi						784.139		784.139		784.139		823.346		864.514	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI	
			Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	4	4	784.139	4	784.139	4	784.139	4	823.346	4	864.514	Pokja Bina Operasi dan Pemeliharaan	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
			Mempertahankan kondisi sarpras sungai	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir	Km	4,41	2	8.000.000	2	8.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	Pokja Penanggulangan Banjir	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	dan Hidrologi	
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai						8.000.000		8.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI	
			Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	4,41	2	8.000.000	2	8.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
			Tersedianya Data Teknis Sarana Prasarana SDA serta pengelolaan dan peringatan dini banjir	Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Sarana Prasarana SDA, pengelolaan dan peringatan dini banjir	Dokumen	3	4	1.204.712	4	1.204.712	4	1.804.712	4	1.839.948	4	1.876.946	Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi	
		Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)						500.000		500.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI	
			Terbangunnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Unit	3	2	500.000	2	500.000	5	1.100.000	5	1.100.000	5	1.100.000	Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi	BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI / Wilayah Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi						704.712		704.712		704.712		739.948		776.946	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI	
			Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	4	704.712	4	704.712	4	704.712	4	739.948	4	776.946	Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
			Tersusunnya dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Dokumen	3	6	2.200.000	4	2.400.000	4	2.600.000	6	2.800.000	6	3.000.000	Pokja Bina Operasi dan Pemeliharaan	
		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi						2.200.000		2.400.000		2.600.000		2.800.000		3.000.000	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI	
			Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	3	6	2.200.000	4	2.400.000	4	2.600.000	6	2.800.000	6	3.000.000	Pokja Bina Operasi dan Pemeliharaan	DPUPR - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						6.938.928		7.745.069		8.132.323		13.819.132		14.510.089	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	34,78	35,08	1.530.000	35,38	2.065.694	35,68	2.168.979	35,98	2.065.694	36,28	2.168.979	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.530.000		2.065.694		2.168.979		2.065.694		2.168.979	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Mempertahankan kinerja Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	%	100	100	1.530.000	100	2.065.694	100	2.168.979	100	2.065.694	100	2.168.979	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		Operasi dan Pemeliharaan Embung						1.530.000		2.065.694		2.168.979		2.065.694		2.168.979	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Beroperasi dan terpeliharanya embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	27	27	1.530.000	27	2.065.694	27	2.168.979	27	2.065.694	27	2.168.979	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
			Terjaganya kondisi sungai kewenangan Provinsi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	53,26	53	5.408.928	53,04	5.679.375	53,08	5.963.344	53,12	11.753.438	53,16	12.341.110	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						5.408.928		5.679.375		5.963.344		11.753.438		12.341.110	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Mempertahankan kondisi sarpras sungai	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA	%	100	100	5.408.928	100	5.679.375	100	5.963.344	100	11.753.438	100	12.341.110	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai						5.408.928		5.679.375		5.963.344		11.753.438		12.341.110	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	6,45	5	5.408.928	5	5.679.375	5	5.963.344	6	11.753.438	6	12.341.110	Pokja Operasi dan Pemeliharan	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						5.067.839		6.500.208		6.825.219		7.052.414		7.405.035	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	52,3	56,98	1.668.020	57,14	2.386.151	57,3	2.505.459	57,49	2.386.151	57,62	2.505.459	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.668.020		2.386.151		2.505.459		2.386.151		2.505.459	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Mempertahankan kinerja Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	%	100	100	1.668.020	100	2.386.151	100	2.505.459	100	2.386.151	100	2.505.459	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
		Operasi dan Pemeliharaan Embung						1.668.020		2.386.151		2.505.459		2.386.151		2.505.459	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Beroperasi dan terpeliharanya embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	31	32	1.668.020	32	2.386.151	32	2.505.459	32	2.386.151	32	2.505.459	Pokja Operasi dan Pemeliharan	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
			Terjaganya kondisi sungai kewenangan Provinsi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	50,04	50,14	3.399.819	50,18	4.114.057	50,2	4.319.760	50,22	4.666.263	50,24	4.899.576	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.399.819		4.114.057		4.319.760		4.666.263		4.899.576	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Mempertahankan kondisi sarpras sungai	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA	%	100	100	3.399.819	100	4.114.057	100	4.319.760	100	4.666.263	100	4.899.576	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai						3.399.819		4.114.057		4.319.760		4.666.263		4.899.576	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	3,53	1,2	3.399.819	1,2	4.114.057	1,2	4.319.760	1,2	4.666.263	1,2	4.899.576	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						1.335.881		1.469.469		1.542.943		1.620.091		1.701.096	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	%	77,78	78,08	1.335.881	78,38	1.469.469	78,68	1.542.943	78,98	1.620.091	79,28	1.701.096	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.335.881		1.469.469		1.542.943		1.620.091		1.701.096	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Mempertahankan kinerja Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	%	100	100	1.335.881	100	1.469.469	100	1.542.943	100	1.620.091	100	1.701.096	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
		Operasi dan Pemeliharaan Embung						1.335.881		1.469.469		1.542.943		1.620.091		1.701.096	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Beroperasi dan terpeliharanya embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	20	20	1.335.881	20	1.469.469	20	1.542.943	20	1.620.091	20	1.701.096	Pokja Operasi dan Pemeliharan	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						873.103		901.300		946.365		993.684		1.043.369	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	%	76,5	76,5	873.103	77,1	901.300	77,4	946.365	77,7	993.684	78	1.043.369	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						873.103		901.300		946.365		993.684		1.043.369	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Mempertahankan kinerja Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	%	100	100	873.103	100	901.300	100	946.365	100	993.684	100	1.043.369	Pokja Operasi dan Pemeliharan	
		Operasi dan Pemeliharaan Embung						873.103		901.300		946.365		993.684		1.043.369	DPUPR - BPSDA SERAYU	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	BOGOWONTO	
			Beroperasi dan terpeliharanya embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	13	14	873.103	14	901.300	14	946.365	14	993.684	14	1.043.369	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO
	Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang							6.810.000		6.610.000		6.610.000		6.610.000		6.610.000	DPUPR	
				Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	62,86	60,17	3.350.000	69,35	2.650.000	76,03	2.650.000	82,71	2.650.000	88,59	2.650.000	DPUPR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						3.350.000		2.650.000		2.650.000		2.650.000		2.650.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	%	55	75	2.100.000	85	1.400.000	90	1.400.000	95	1.400.000	100	1.400.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi						2.100.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya ketersediaan dokumen kegiatan perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	3	3	2.100.000	3	1.400.000	2	1.400.000	2	1.400.000	2	1.400.000	Pokja Perencanaan Tata Ruang	
		Penetapan RTRW Provinsi						1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	DPUPR - BIDANG	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	PENATAAN RUANG	
			Tersedianya Perda RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi	Dokumen	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Perencanaan Tata Ruang	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG
			Tersedianya Perda RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan	Dokumen	1	2	1.200.000	2	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	Pokja Perencanaan Tata Ruang	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang						900.000		200.000		200.000		200.000		200.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	100	1000	900.000	300	200.000	300	200.000	300	200.000	300	200.000	Pokja Perencanaan Tata Ruang	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG
			Meningkatnya Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	%	70,71	45,34	1.250.000	53,7	1.250.000	62,06	1.250.000	70,42	1.250.000	77,17	1.250.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang						1.250.000		1.250.000		1.250.000		1.250.000		1.250.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya ketersediaan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	25	26	1.250.000	26	1.250.000	26	1.250.000	26	1.250.000	26	1.250.000	Pokja Perencanaan Tata Ruang	
		Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	24	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.000.000	Pokja Perencanaan Tata Ruang	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi						250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	1	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	Pokja Perencanaan Tata Ruang	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG
				Persentase implementasi pemanfaaatan ruang	%	68	75,31	1.060.000	78,91	1.060.000	82,51	1.060.000	86,11	1.060.000	89,71	1.060.000	DPUPR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						1.060.000		1.060.000		1.060.000		1.060.000		1.060.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	%	100	100	440.000	100	440.000	100	440.000	100	440.000	100	440.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						440.000		440.000		440.000		440.000		440.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	4	3	440.000	3	440.000	3	440.000	3	440.000	3	440.000	Pokja Pemanfaatan Ruang	
		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						440.000		440.000		440.000		440.000		440.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	4	3	440.000	3	440.000	3	440.000	3	440.000	3	440.000	Pokja Pemanfaatan Ruang	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG
			Meningkatnya Pelaksanaan Sinkronisasi Program	Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program	%	28	58,86	620.000	64,86	620.000	70,86	620.000	76,86	620.000	82,86	620.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						620.000		620.000		620.000		620.000		620.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya dokumen implementasi pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen implementasi pemanfaatan ruang	Dokumen	4	4	620.000	4	620.000	4	620.000	4	620.000	4	620.000	Pokja Pemanfaatan Ruang	
		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	2	2	300.000	2	300.000	2	300.000	2	300.000	2	300.000	Pokja Pemanfaatan Ruang	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG
		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						320.000		320.000		320.000		320.000		320.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	2	320.000	2	320.000	2	320.000	2	320.000	2	320.000	Pokja Pemanfaatan Ruang	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG
				Persentase Tertib Ruang	%	48	55	2.400.000	60	2.900.000	66	2.900.000	70	2.900.000	73	2.900.000	DPUPR	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						1.900.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	%	17	77	700.000	80	700.000	83	700.000	86	700.000	89	700.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						700.000		700.000		700.000		700.000		700.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya dokumen pengawasan penataan ruang	Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	Dokumen	2	3	700.000	3	700.000	3	700.000	3	700.000	3	700.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat						450.000		450.000		450.000		450.000		450.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	1	1	450.000	1	450.000	1	450.000	1	450.000	1	450.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG
		Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan						250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	1	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	31	41	1.200.000	46	1.700.000	54	1.700.000	59	1.700.000	63	1.700.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi						1.200.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya ketersediaan dokumen pengendalian pemanfaatan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen	4	6	1.200.000	6	1.700.000	6	1.700.000	6	1.700.000	6	1.700.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						1.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	5	5	1.000.000	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.500.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG
		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG	
			Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	N/A	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DPUPR - BIDANG PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	DPUPR - BPSDA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	PEMALI COMAL	
			Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	100	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Tersedianya dokumen pemantauan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA	Dokumen	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL	
			Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	DPUPR - BPSDA PEMALI COMAL
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						175.000		175.000		175.000		175.000		175.000	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Jratun Seluna	%	100	100	175.000	100	175.000	100	175.000	100	175.000	100	175.000	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						175.000		175.000		175.000		175.000		175.000	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya dokumen pemantauan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA	Dokumen	1	1	175.000	1	175.000	1	175.000	1	175.000	1	175.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						175.000		175.000		175.000		175.000		175.000	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA	
			Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	175.000	1	175.000	1	175.000	1	175.000	1	175.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	DPUPR - BPSDA JRATUN SELUNA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	100	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	
			Tersedianya dokumen pemantauan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA	Dokumen	1	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	DPUPR - BPSDA BENGAWAN SOLO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Tersedianya dokumen pemantauan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA	Dokumen	1	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO	
			Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	DPUPR - BPSDA SERAYU BOGOWONTO
	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Aman							9.825.675		35.009.373		42.848.068		101.814.669		115.862.563	DPUPR	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	19,2	41,2	8.660.675	45,9	33.696.625	50,6	41.535.320	55,3	67.527.015	57,35	108.498.635	DPUPR	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						8.660.675		33.696.625		41.535.320		67.527.015		108.498.635	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	N/A	100	1.197.000	100	21.871.250	100	26.127.120	100	48.535.990	100	89.507.610	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						1.197.000		21.871.250		26.127.120		48.535.990		89.507.610	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Meningkatnya Kapasitas Yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota	Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota (Liter/ Detik)	Liter/Detik	N/A	N/A	1.197.000	37,5	21.871.250	47,5	26.127.120	57,5	48.535.990	108	89.507.610	Pokja Pengembangan Air Minum	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						0		20.674.250		24.930.120		47.338.990		88.405.110	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	N/A	N/A	0	37,5	20.674.250	47,5	24.930.120	57,5	47.338.990	108	88.405.110	Pokja Pengembangan Air Minum	BIDANG CIPTA KARYA

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						1.197.000		1.197.000		1.197.000		1.197.000		1.102.500	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	N/A	7	1.197.000	6	1.197.000	6	1.197.000	6	1.197.000	4	1.102.500	Pokja Pengembangan Air Minum	BIDANG CIPTA KARYA / KOTA SEMARANG
			Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	26,59	31,02	6.963.675	33,24	11.325.375	35,47	14.908.200	37,69	18.491.025	39,92	18.491.025	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						6.963.675		11.325.375		14.908.200		18.491.025		18.491.025	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Meningkatnya Sambungan Rumah Di Jawa Tengah Yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Rumah Tangga)	Sambungan Rumah (SR)	N/A	109004	6.963.675	111429	11.325.375	113908	14.908.200	116443	18.491.025	119024	18.491.025	Pokja Pengembangan Air Minum	
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota						6.963.675		11.325.375		14.908.200		18.491.025		18.491.025	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	N/A	35	500.000	35	500.000	35	500.000	35	500.000	35	500.000	Pokja Pengembangan Air Minum	BIDANG CIPTA KARYA
			Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Perdesaan	Kabupaten/Kota	N/A	13	700.000	13	700.000	18	700.000	17	700.000	17	700.000	Pokja Pengembangan Air Minum	BIDANG CIPTA KARYA / SEMARANG
			Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa (lokasi)	Lokasi	N/A	10	5.763.675	18	10.125.375	24	13.708.200	30	17.291.025	30	17.291.025	Pokja Pengembangan Air Minum	BIDANG CIPTA KARYA
			Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	N/A	42,6	500.000	45,73	500.000	48,87	500.000	52	500.000	55,13	500.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Meningkatnya Sambungan Rumah yang mengakses air minum jaringan perpipaan PDAM bersumber dari SPAM Regional	Jumlah Sambungan Rumah yang mengakses air minum jaringan perpipaan PDAM bersumber dari SPAM Regional	Sambungan Rumah (SR)	N/A	154181	500.000	154981	500.000	155781	500.000	156581	500.000	157381	500.000	Pokja Pengembangan Air Minum	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit	N/A	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	Pokja Pengembangan Air Minum	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	9,72	17,83	1.165.000	21,89	1.312.748	25,94	1.312.748	30	34.287.654	32,05	7.363.928	DPUPR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						105.000		252.748		252.748		303.942		0	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Terselenggaranya Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun	%	N/A	100	105.000	100	252.748	100	252.748	100	303.942	100	0	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						105.000		252.748		252.748		303.942		0	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Terlaksanannya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah TPA/TPST/SPA yang dibangun (Unit)	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	
		Pembangunan TPA/TPST/SPA						0		0		0		0		0	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Terbangunnya TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	Ton/hari	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Pengembangan	BIDANG CIPTA KARYA /

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	Penyehatan Lingkungan	KOTA SEMARANG
			Terlaksanannya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun (Unit)	Unit	N/A	1	105.000	1	252.748	1	252.748	1	303.942	1	0	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	
		Pembangunan TPA/TPST/SPA						0		0		0		0		0	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Terbangunnya TPA/TPST/SPA	Jumlah Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun	Ton/hari	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	BIDANG CIPTA KARYA / KOTA SEMARANG
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						105.000		252.748		252.748		303.942		0	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	N/A	1	105.000	1	252.748	1	252.748	1	303.942	N/A	0	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	BIDANG CIPTA KARYA / KOTA SEMARANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						1.060.000.000		1.060.000.000		1.060.000.000		33.983.712		7.363.928	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kapasitas akses air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga yang dapat terlayani IPLT lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan Rumah Tangga di area pelayanan IPLT lintas kabupaten/kota	%	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	11,43	32.661.212	23	6.303.928	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						0		0		0		32.661.212		6.303.928	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga terlayani IPLT lintas kabupaten/kota (Rumah Tangga)	Rumah Tangga	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	7895	32.661.212	15890	6.303.928	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						0		0		0		32.661.212		6.303.928	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	M^3/Hari	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	67	32.661.212	32	6.303.928	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	BANJARNEGARA / BIDANG CIPTA KARYA / PURBALINGGA
			Meningkatnya kapasitas akses air limbah domestik	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan	%	N/A	100	1.060.000	100	1.060.000	100	1.060.000	100	1.322.500	100	1.060.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				pembinaan dan pemberdayaan														
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						1.060.000		1.060.000		1.060.000		1.322.500		1.060.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses air limbah domestik aman Th-N (Rumah Tangga)	Rumah Tangga	N/A	1746439	1.060.000	2175728	1.060.000	2616895	1.060.000	3069941	1.322.500	3326650	1.060.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						210.000		210.000		210.000		472.500		210.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	N/A	2	210.000	2	210.000	2	210.000	3	472.500	2	210.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	BIDANG CIPTA KARYA / KOTA SEMARANG
		Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						850.000		850.000		850.000		850.000		850.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan/atau Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	N/A	720	850.000	720	850.000	720	850.000	720	850.000	720	850.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	BIDANG CIPTA KARYA / KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD)							5.724.100		46.842.680		6.244.050		38.769.618		130.323.067	DPUPR	
				Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) Dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar	%	49,42	68,06	5.724.100	76,02	46.842.680	80,78	6.244.050	86,41	38.769.618	89,81	130.323.067	DPUPR	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						730.000		41.524.980		480.000		32.823.318		123.999.567	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	N/A	6,41	730.000	7,96	41.524.980	4,76	480.000	5,63	32.823.318	3,4	123.999.567	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						730.000		41.524.980		480.000		32.823.318		123.999.567	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terselenggaranya Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudahdilakukan pendataan teknis pada tahun n (Lokasi)	Lokasi	N/A	66	730.000	82	41.524.980	49	480.000	58	32.823.318	35	123.999.567	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
		Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat						100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	N/A	160	100.000	160	100.000	160	100.000	160	100.000	160	100.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	BIDANG CIPTA KARYA / KOTA SEMARANG
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						630.000		41.424.980		380.000		32.723.318		123.899.567	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	N/A	2	200.000	2	41.044.980	1	0	6	32.343.318	15	123.519.567	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	BIDANG CIPTA KARYA / KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n (Dokumen)	Dokumen	N/A	1	250.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	BIDANG CIPTA KARYA / KOTA SEMARANG
			Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	N/A	60	180.000	60	180.000	60	180.000	60	180.000	60	180.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	BIDANG CIPTA KARYA / KOTA SEMARANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Terselenggaranya Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	%	N/A	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
			Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Dokumen	N/A	4	200.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi						200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	N/A	160	200.000	160	200.000	160	200.000	160	200.000	160	200.000	DPUPR - BIDANG CIPTA KARYA	BIDANG CIPTA KARYA / KOTA SEMARANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						4.794.100		5.117.700		5.564.050		5.746.300		6.123.500	DPUPR - BALAI JAKON	
			Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi	%	N/A	51,45	4.794.100	51,82	5.117.700	52,12	5.564.050	52,33	5.746.300	52,48	6.123.500	DPUPR - BALAI JAKON	
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						3.536.600		3.761.200		4.072.800		4.130.800		4.356.000	DPUPR - BALAI JAKON	
			Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang Tersertifikasi S.D Tahun N	Dokumen	N/A	3	3.536.600	3	3.761.200	3	4.072.800	3	4.130.800	3	4.356.000	DPUPR - BALAI JAKON	
		Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						276.600		304.200		331.800		359.800		385.000	DPUPR - BALAI JAKON	
			Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Orang	N/A	40	276.600	40	304.200	40	331.800	40	359.800	40	385.000	DPUPR - BALAI JAKON	BALAI JAKON / KOTA SEMARANG
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						1.325.000		1.432.000		1.530.000		1.620.000		1.720.000	DPUPR - BALAI JAKON	
			Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang	N/A	1900	1.325.000	1950	1.432.000	2000	1.530.000	2050	1.620.000	2100	1.720.000	DPUPR - BALAI JAKON	BALAI JAKON / KOTA

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			mendapatkan Pelatihan															SEMARANG
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						1.935.000		2.025.000		2.211.000		2.151.000		2.251.000	DPUPR - BALAI JAKON	
			Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang	N/A	1100	1.935.000	1150	2.025.000	1200	2.211.000	1250	2.151.000	1300	2.251.000	DPUPR - BALAI JAKON	BALAI JAKON / KOTA SEMARANG
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi						797.500		852.500		916.250		982.500		1.047.500	DPUPR - BALAI JAKON	
			Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Dokumen	N/A	2	797.500	2	852.500	2	916.250	2	982.500	2	1.047.500	DPUPR - BALAI JAKON	
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi						682.500		732.500		791.250		852.500		912.500	DPUPR - BALAI JAKON	
			Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen	N/A	2	247.500	2	270.000	2	300.000	2	330.000	2	350.000	DPUPR - BALAI JAKON	BALAI JAKON / KOTA SEMARANG
			Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah pengadaan Buku Konstruksi	Buah	N/A	125	25.000	125	27.500	125	31.250	125	35.000	125	37.500	DPUPR - BALAI JAKON	BALAI JAKON / KOTA SEMARANG
			Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani	Kegiatan	N/A	1	50.000	1	55.000	1	60.000	1	67.500	1	75.000	DPUPR - BALAI JAKON	BALAI JAKON / KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah stand pameran yang dilaksanakan	Unit	N/A	4	360.000	4	380.000	4	400.000	4	420.000	4	450.000	DPUPR - BALAI JAKON	BALAI JAKON / KOTA SEMARANG
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI						115.000		120.000		125.000		130.000		135.000	DPUPR - BALAI JAKON	
			Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	N/A	80	115.000	80	120.000	80	125.000	80	130.000	80	135.000	DPUPR - BALAI JAKON	BALAI JAKON / KOTA SEMARANG
		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						460.000		504.000		575.000		633.000		720.000	DPUPR - BALAI JAKON	
			Terlaksanannya Kegiatan Pengawasan Bidang Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi	Dokumen	N/A	4	460.000	4	504.000	4	575.000	4	633.000	4	720.000	DPUPR - BALAI JAKON	
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						65.000		72.000		85.000		95.000		115.000	DPUPR - BALAI JAKON	
			Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	N/A	130	65.000	130	72.000	135	85.000	135	95.000	140	115.000	DPUPR - BALAI JAKON	BALAI JAKON / KOTA SEMARANG
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						65.000		72.000		85.000		95.000		115.000	DPUPR - BALAI JAKON	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi	N/A	50	65.000	50	72.000	55	85.000	55	95.000	60	115.000	DPUPR - BALAI JAKON	BALAI JAKON / KOTA SEMARANG
		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						230.000		250.000		275.000		300.000		330.000	DPUPR - BALAI JAKON	
			Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	N/A	80	230.000	80	250.000	80	275.000	80	300.000	80	330.000	DPUPR - BALAI JAKON	BALAI JAKON / KOTA SEMARANG
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						100.000		110.000		130.000		143.000		160.000	DPUPR - BALAI JAKON	
			Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	N/A	70	100.000	70	110.000	75	130.000	75	143.000	80	160.000	DPUPR - BALAI JAKON	BALAI JAKON / KOTA SEMARANG

Tabel 4.2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
A	**Program Prioritas**					
1	Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Penyusunan DED Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan	1 Dokumen	Program Penataan Bangunan Gedung/ Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi/ Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
B	**Program Intervensi**					

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	Kantor Gubernur Rumah Rakyat	1. Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur (APBDP 2025) 2. Rehabilitasi Gedung Penunjang Gubernur (APBDP 2025) 3. Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Gubernur (APBDP 2025) 4. Rehabilitasi Gedung Penunjang Wakil Gubernur (APBDP 2025) 5. Rehabilitasi Wisma Perdamaian (APBDP 2025) 6. Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur Puri Gedeh (APBDP 2025) 7. Rehabilitasi Dapur, Carport dan eksterior (APBDP 2025)	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Program Penataan Bangunan gedung/ Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi/ Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
2	Mendorong pembangunan sistem desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi suplai air bersih dan mengatasi dampak eksploitasi air tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang);	Pembangunan desalinasi di kawasan pesisir Jawa Tengah	10 Paket	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/ Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	LPPM Universitas Diponegoro
C	**Progam Aksi**					

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter	Pelebaran jalan provinsi menuju standar jalan kolektor 7m dan rekonstruksi jalan	33,1 KM	Program Penyelenggaraan Jalan/ Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi/ Sub Keg Pelebaran Menuju Standar , Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
2	Mendorong pembangunan Giant Sea Wall (tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah);	Fasilitasi dan koordinasi pembangunan tanggul laut ke Pemerintah Pusat berupa:				
		DED dan Dokling APO Hybrid Sea Wall Sayung	2 Dokumen	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	- DLHK - Kementerian PUPR (BBWS)
		Review DED Sea Wall Sayung	1 Dokumen	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	- Kementerian PUPR (BBWS)
		Pembangunan Pelindung Pantai (APO) Hybrid Sea Wall Sayung	1 KM	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	- DLHK - Kementerian PUPR (BBWS) - UNDIP
		Normalisasi/Restorasi Sungai - S. Blorong Kab. Kendal	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Normalisasi/Restorasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
				Sungai		
3	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional					
		Normalisasi/Restorasi Sungai - S. Blorong Kab. Kendal	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Normalisasi/Restorasi Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
4	Menyiapkan sistem irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak, Pati);					
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Kewenangan Provinsi) - DI. Kedungwaru Kab. Grobogan	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Kewenangan	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengembangan dan Pengelolaan Sistem	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		Provinsi) - DI Pelayaran Kab. Demak		Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Provinsi Jawa Tengah	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Kewenangan Provinsi) - DI. Medani Kab. Pati	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Kewenangan Provinsi) - DI. Widodaren Kab. Pati	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Kewenangan Provinsi) - Pemeliharaan Berkala DI. Kedungwaru Kab. Grobogan	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Operasi dan Pemeliharaan	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum	

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		Jaringan Irigasi Permukaan (Kewenangan Provinsi) - Pemeliharaan DI. Guntur I Kab. Demak		/ Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Kewenangan Provinsi) - Pemeliharaan DI. Kab. Demak	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Kewenangan Provinsi) - Pemeliharaan DI. Pelayaran Syg Batu Kab. Demak	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Kewenangan Provinsi) - Pemeliharaan DI. Dolok Kab. Demak	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Kewenangan Provinsi) - Pemeliharaan DI. Penggaron Kab. Demak	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Kewenangan Provinsi) - Pemeliharaan Berkala DI. Sentul Kab. Pati	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Kewenangan Provinsi) - Pemeliharaan Berkala DI. Widodaren Kab. Pati	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
D	**Program Taktis**					
1	Mendorong pembangunan SPAM Regional dan SPAM industri untuk penyediaan air bersih;	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/ Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota/ Sub kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	● Pemerintah Pusat : (Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya) ● Pemerintah

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota/		Provinsi ● Pemerintah Kab/Kota Offtaker SPAM Regional
2	Revitalisasi embung;					
		Pembangunan Embung Baru	11 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Pembangunan Embung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	- DLHK - Kementerian PUPR (BBWS) - UNDIP - DPUPR Kab/Kota
		Rehabilitasi Embung eksisting	31 Unit	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Rehabilitasi Embung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Operasional dan Pemeliharaan Embung	101 Unit	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
3	Penataan drainase dan pengendalian banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan, dan Kabupaten Demak					
		Pembangunan Tanggul Sungai - Sungai Sengkarang	2 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		Desa Kedungwuni Kab. Pekalongan		Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Pembangunan Tanggul Sungai	Provinsi Jawa Tengah	
		Pembangunan Tanggul Sungai - Sungai Bremi Meduri Desa Jeruksari Kota/Kab. Pekalongan	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Pembangunan Tanggul Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Pembangunan Tanggul Sungai - Sungai Sengkarang Desa Karangsari Kab. Pekalongan	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Pembangunan Tanggul Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Pembangunan Tanggul Sungai - Sungai Sengkarang Desa Pecakaran Kab. Pekalongan	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Pembangunan Tanggul Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai - Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL) untuk Hybrid Sea Wall Sayung (Kab. Demak)	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	- DLHK - Kementerian PUPR (BBWS) - UNDIP - DPUPR Kab Demak
		Pembangunan Bangunan	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum	- Kementerian

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		Pengamanan Pantai - Tanggul Rob Sayung (Hybrid Seawall) untuk bentang <1,0 km		/ Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	PUPR (BBWS - DPUPR Kab Demak
		Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai - Tanggul Rob Sayung (Hybrid Seawall) untuk sisa bentang ±9,0 km (Tahap 2)	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	- Kementerian PUPR (BBWS) - DPUPR Kab Demak
		Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai - Paket Kontraktual Tanggul ROB Sayung, Kabupaten Demak	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	- Kementerian PUPR (BBWS) - DPUPR Kab Demak
		Pembangunan Tanggul Sungai - Sungai Bodri Desa Kebonharjo, Kab. Kendal	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Pembangunan Tanggul Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Pembangunan Tanggul Sungai - Sungai Bodri Desa Cepiring Kab. Kendal	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Pembangunan Tanggul Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Pembangunan Tanggul Sungai - Sungai Kuto Desa Gempolsewu Kab. Kendal	2 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
				Kabupaten/Kota / Pembangunan Tanggul Sungai		
		Pembangunan Tanggul Sungai - Sungai Bodri Desa Kumpulrejo Kab. Kendal	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Pembangunan Tanggul Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
		Normalisasi/Restorasi Sungai - S. Blorong Kab. Kendal	1 Paket	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Normalisasi/Restorasi Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	
4	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional	Penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan persampahan	4 dokumen	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional/ Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional/ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Indikator	Sat.	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir Kinerja
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	%	47,09	48,18	48,22	48,38	48,71	49,06	49,54	49,54
Persentase Panjang Jaian Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	91,46	93,08	93,12	93,29	93,45	93,59	93,76	93,76
Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap	%	61,56	64,36	64,39	64,41	64,44	64,46	64,49	64,49
Persentase Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air	%	70,78	71,28	71,35	71,47	71,59	71,69	71,79	71,79
Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Angka	67,5	68,45	69,03	69,17	69,47	69,77	70,07	70,07
Persentase Penyediaan Rencana Teknis terhadap Rencana Pembangunan Infrastruktur SDA	%	61,31	62,5	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	19,2	36,5	41,2	45,9	50,6	55,3	57,35	57,35
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	9,72	13,78	17,83	21,89	25,94	30	32,05	14,9
Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar	%	49,42	61,65	68,06	76,02	80,78	86,41	89,81	89,81

Indikator	Sat.	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir Kinerja
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Tertib Ruang	%	48	48	55	60	66	70	73	73
Persentase implementasi pemanfaaatan ruang	%	68	71,71	75,31	78,91	82,51	86,11	89,71	89,71
Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	62,86	50,99	60,17	69,35	76,03	82,71	88,59	88,59
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	N/A	N/A	80,02	80,82	81,62	82,42	83,22	83,22

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai pada tahun 2025 - 2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025–20299 dapat dilhat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Penetapan Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	*Baseline* Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Rasio Kemantapan Jalan	%	90,88	91,46	93,08	93,12	93,29	93,45	93,59	93,76	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	*Baseline* Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	22,04	22,96	23,01	23,27	23,45	23,7	24,61	24,73	
5.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	%	9,5	2,16	2,16	4,36	15,37	21,97	26,38	31,88	beda basis peta 2023 dan 2024
6.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja SPM	*BaseLine* Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh curah lintas Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	N/A Penyusunan DED IPLT Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	N/A Pembangunan fisik tahap 1 (pematangan lahan dan pelebaran jalan akses	N/A Usulan pembangunan fisik bangunan pengolahan IPLT dan sarana pendukung melalui APBN	N/A Pembangunan fisik melalui APBN (tentatif)	23% IPLT mulai operasional (Target kapasitas terpakai 8 m3/hari dari kapasitas terpasang 35 m3/hari)	34% IPLT mulai operasional (Target kapasitas terpakai 12 m3/hari dari kapasitas terpasang 35 m3/hari)	57% IPLT mulai operasional (Target kapasitas terpakai 20 m3/hari dari kapasitas terpasang 35 m3/hari)	69% IPLT mulai operasional (Target kapasitas terpakai 24 m3/hari dari kapasitas terpasang 35 m3/hari)	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan bidang urusan kebinamargaan, keciptakaryaan, jasa konstruksi, sumber daya air dan penataan ruang sesuai tantangan dan isu strategis dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan implementasi Renstra DPUPR Provinsi Jawa Tengah sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup DPUPR Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini.

DPUPR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan DPUPR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah. Renstra DPUPR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi DPUPR Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka DPUPR Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran di lingkup DPUPR Provinsi Jawa Tengah sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

Pohon Kinerja Bidang Bina Teknik Tahun 2025-2029

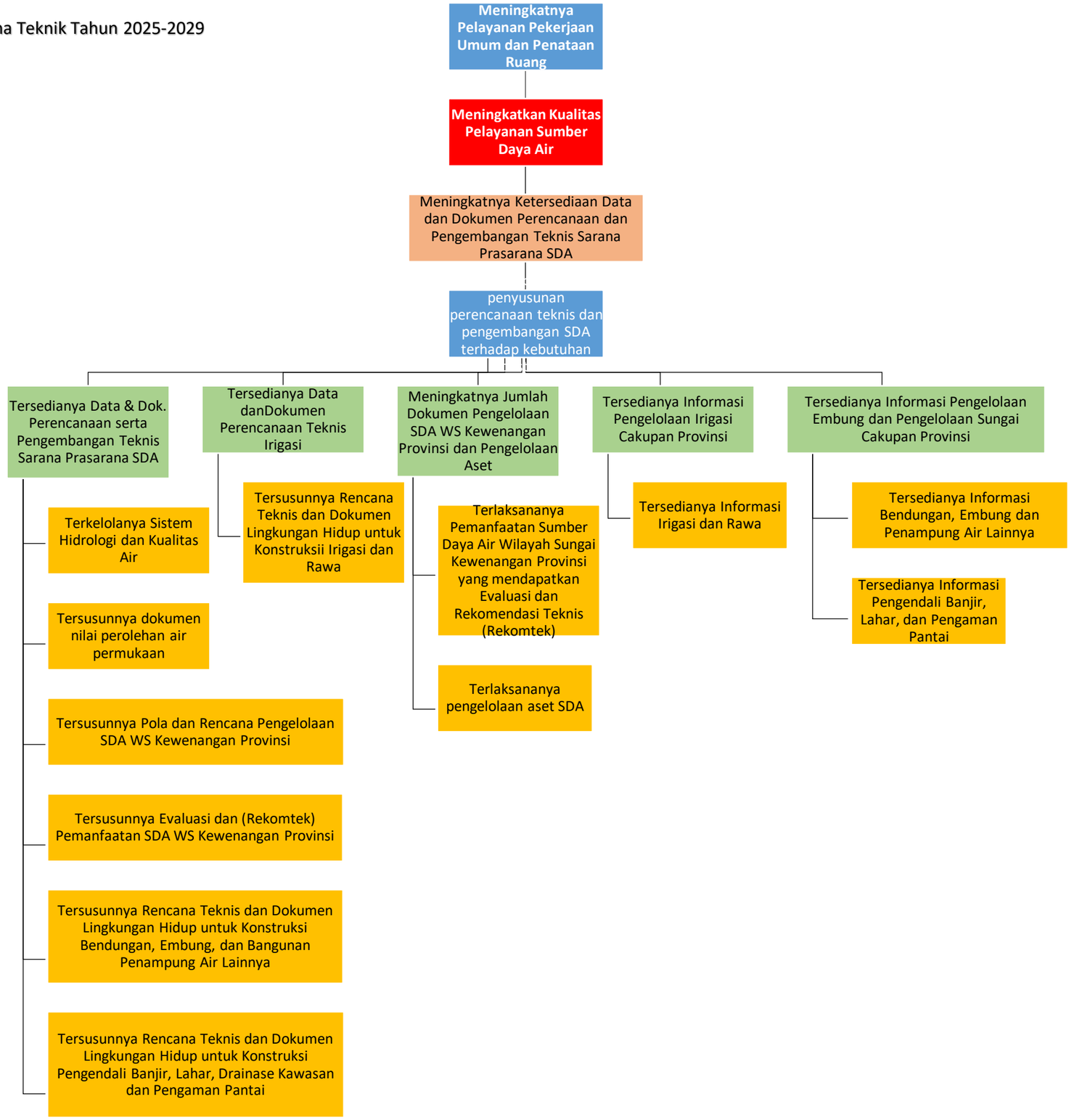

Pohon Kinerja Bidang Irigasi dan Air Baku Tahun 2025-2029

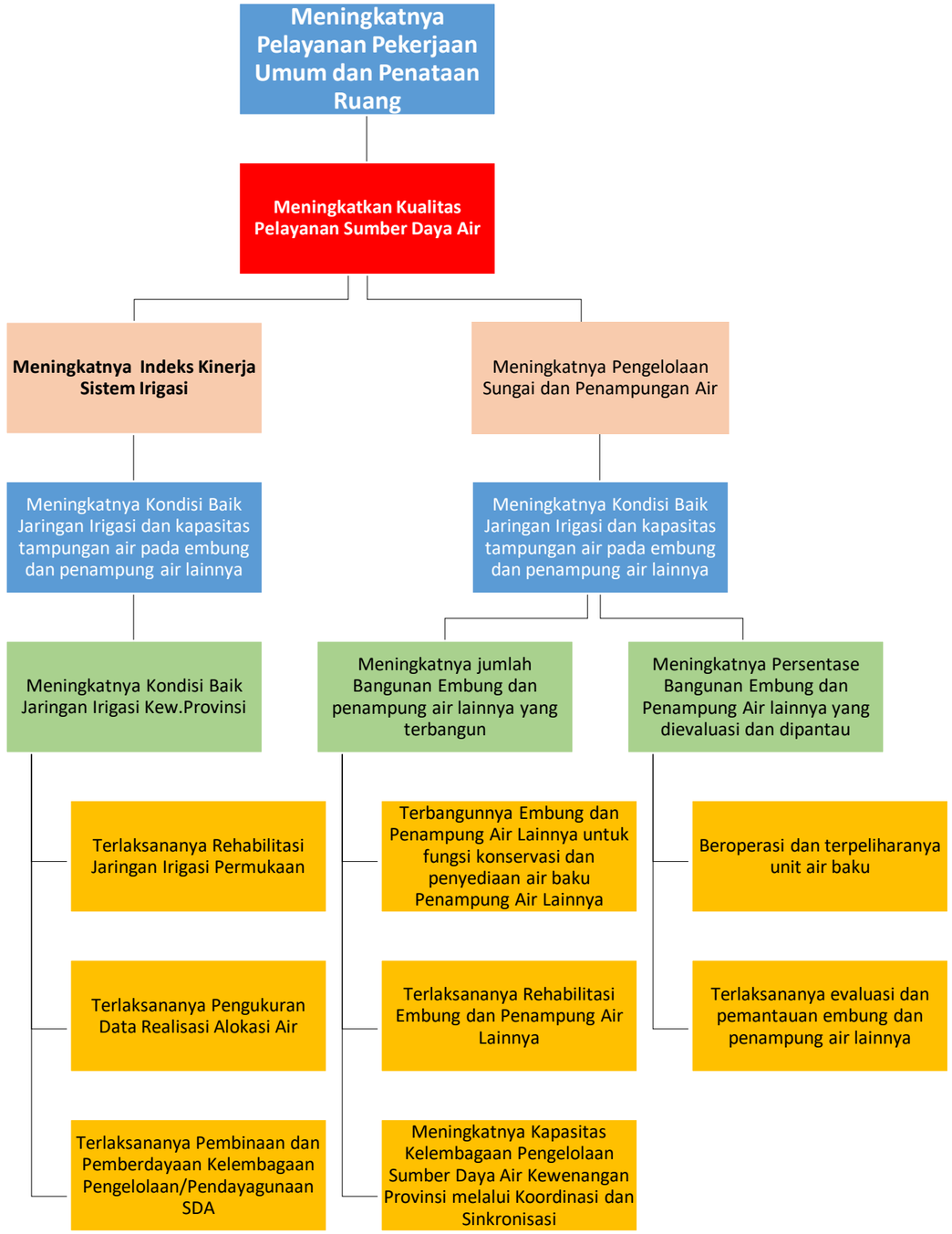

Pohon Kinerja Bidang Sungai Bendungan dan Pantai Tahun 2025-2029

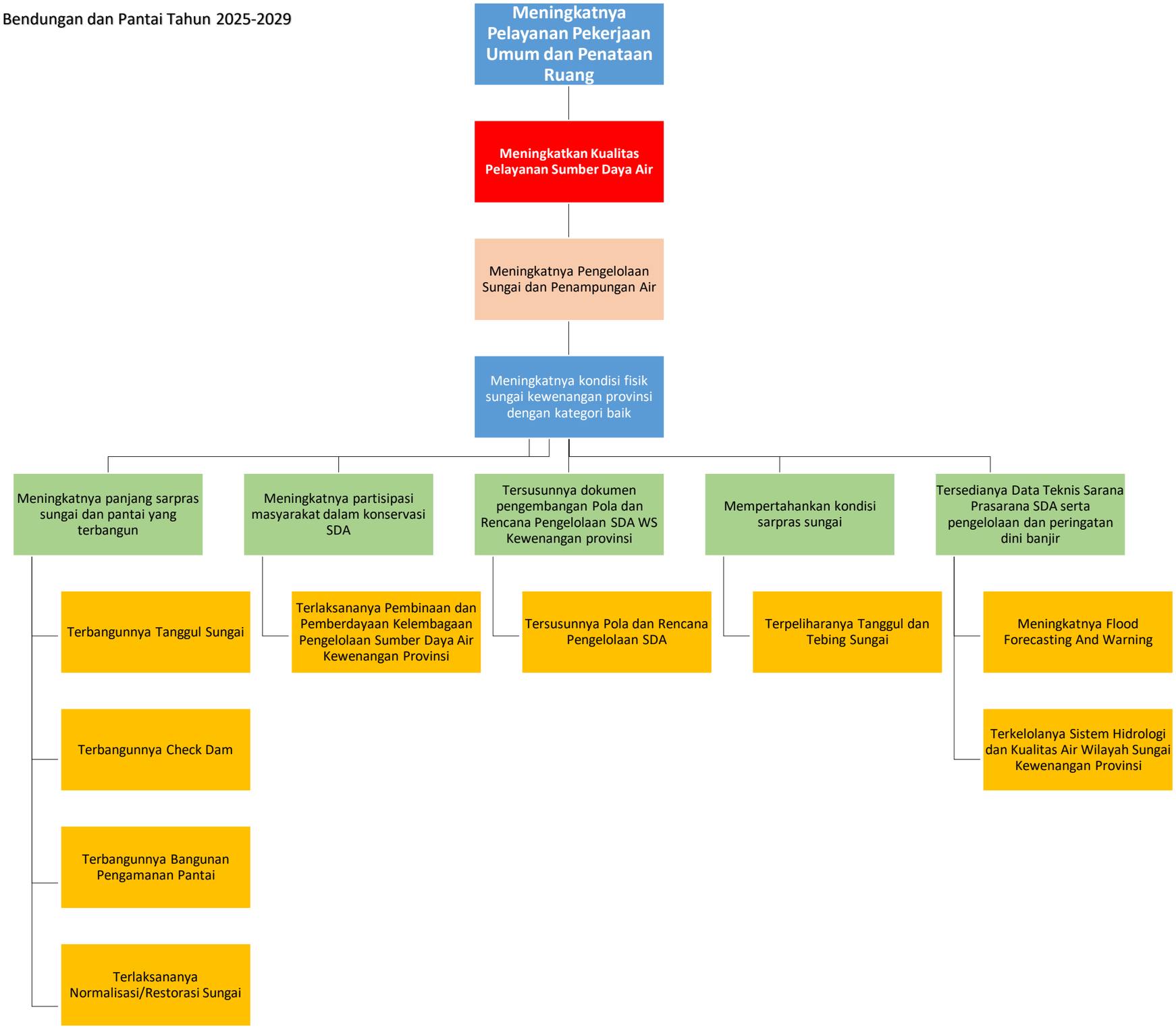

Pohon Kinerja Bidang Penataan Ruang Tahun 2025-2029

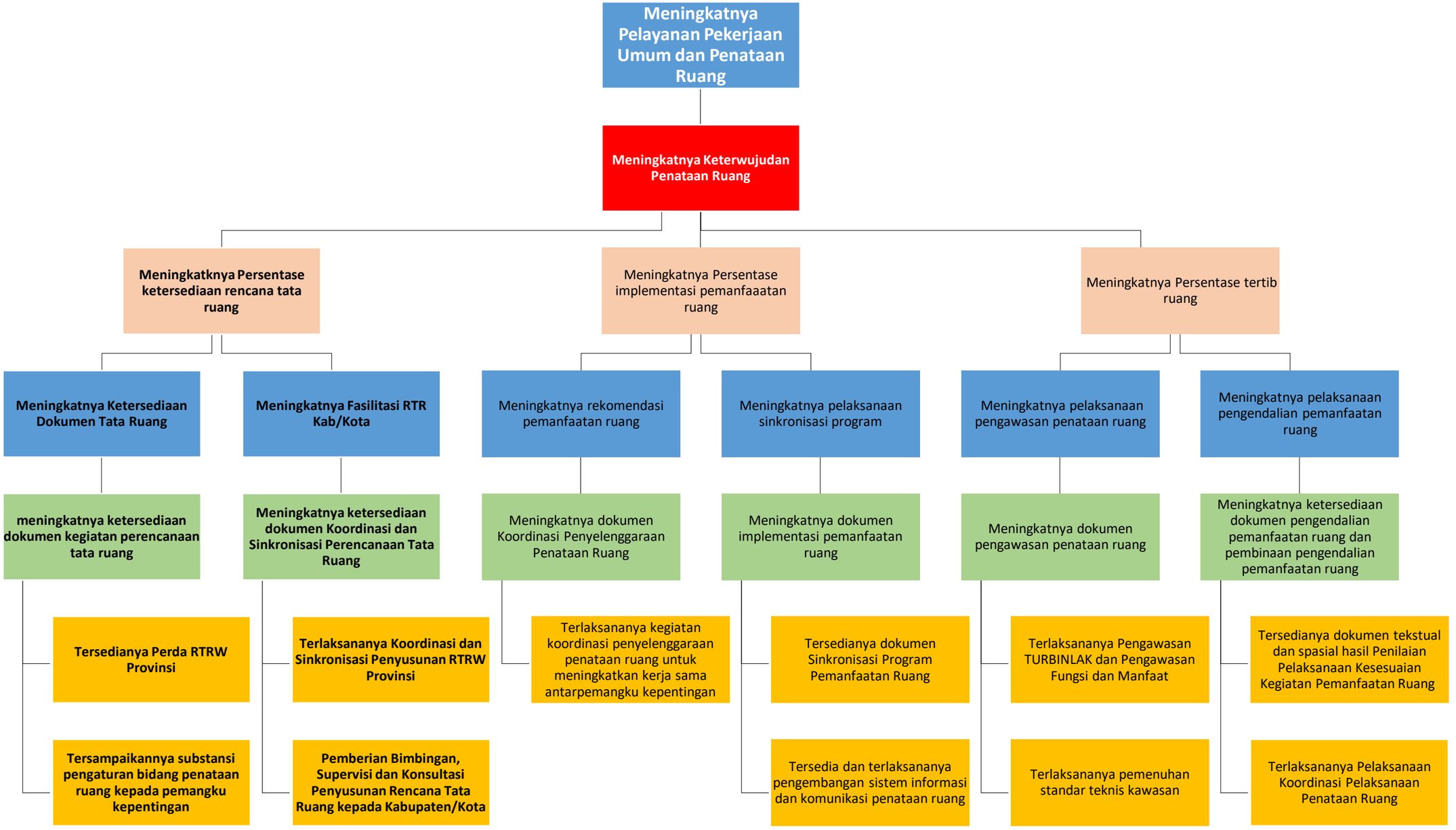

Pohon Kinerja BPSDA Pemali Comal dan BPSDA Jratun Seluna Tahun 2025-2029

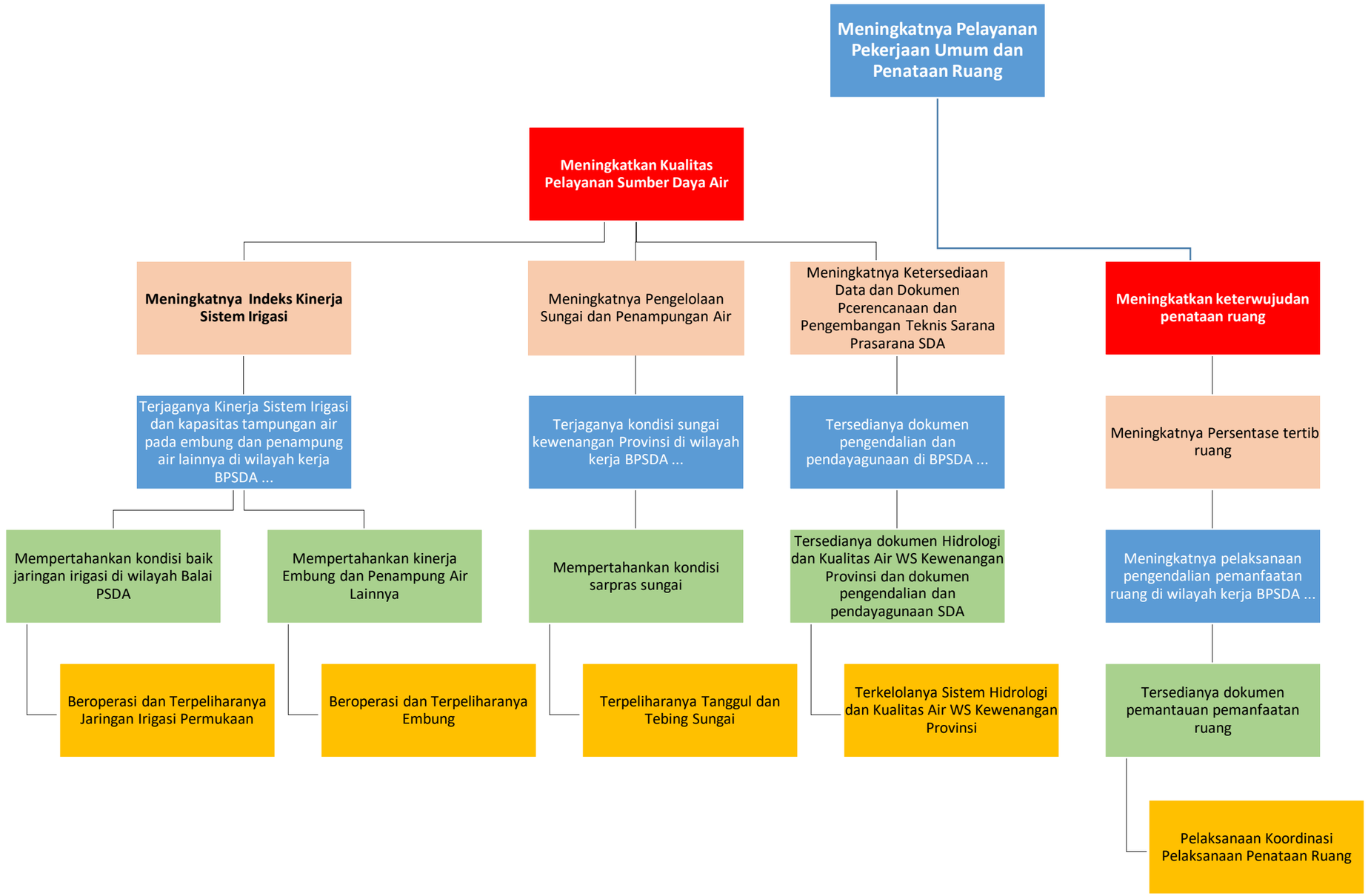

Pohon Kinerja BPSDA Bengawan Solo dan BPSDA Serayu Bogowonto Tahun 2025-2029

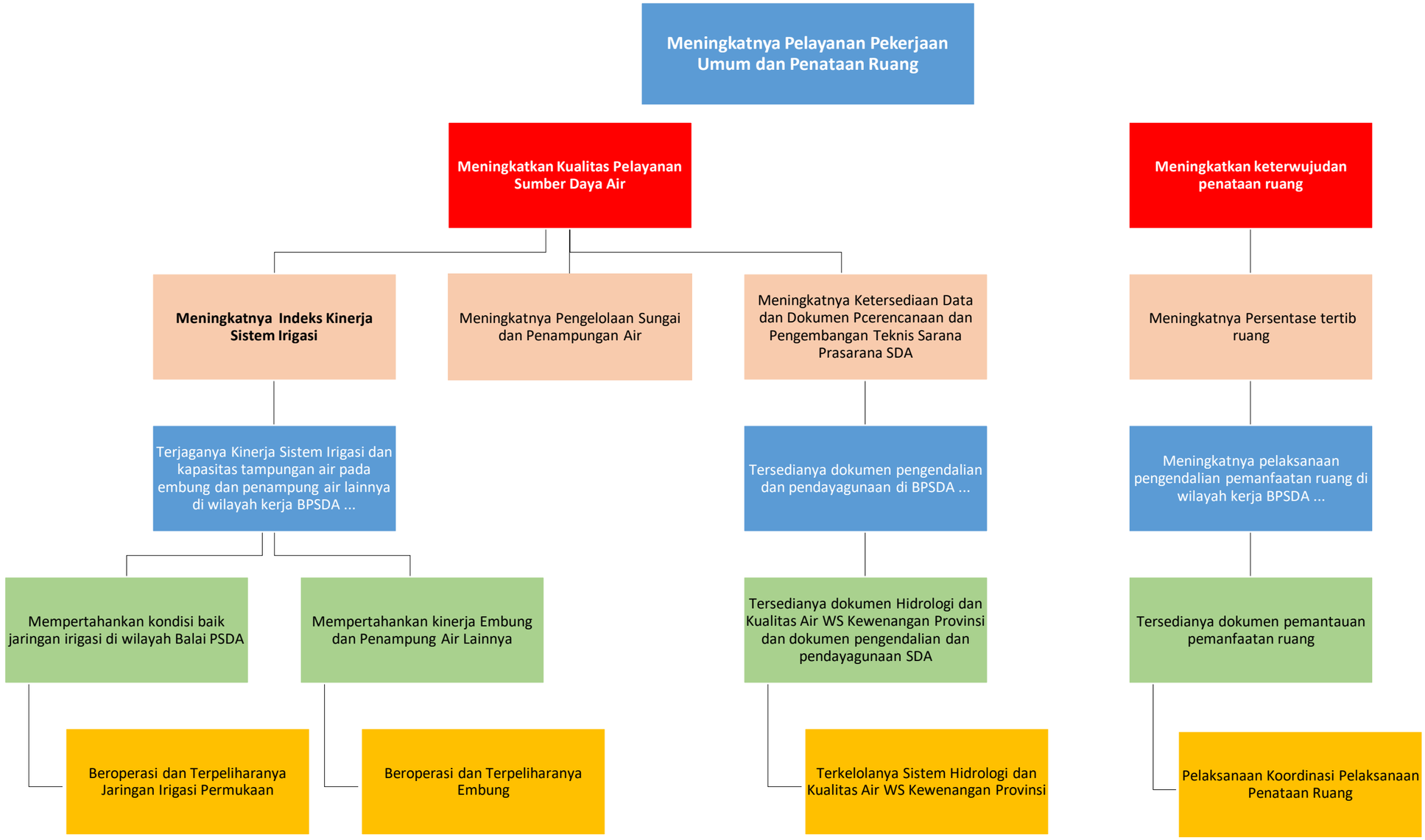

Pohon Kinerja Kebinamargaan Tahun 2025-2029

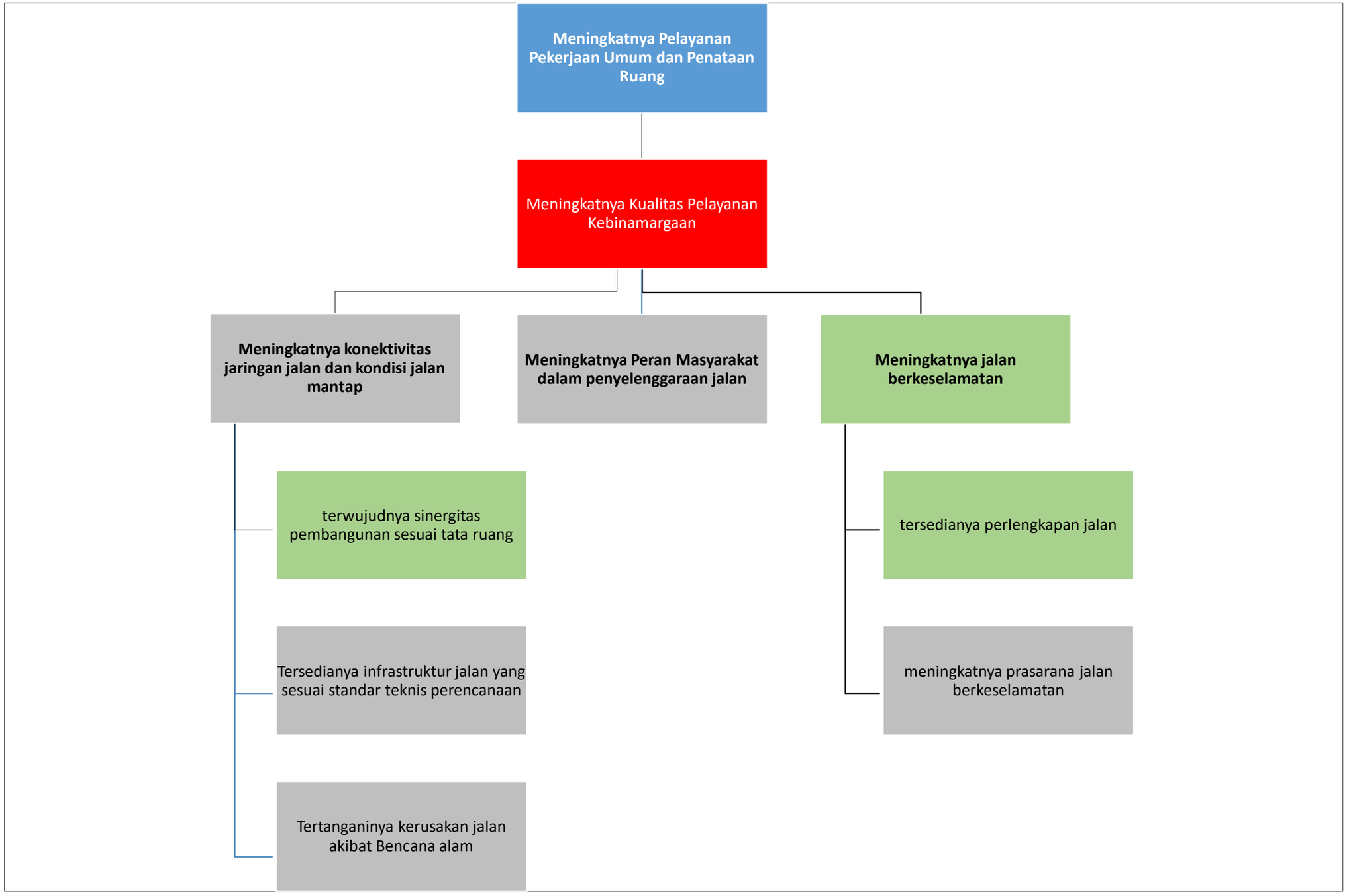

Pohon Kinerja Keciptakaryaan Tahun 2025-2029

Meningkatnya Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meningkatnya Akses Air Minum Aman

Terwujudnya Kualitas dan Kuantitas Sarpras SPAM

Terpelihara dan Terkelolanya Sarpras SPAM terbangun

- Tersusunnya dokumen perencanaan SPAM
- Terlaksananya pembangunan dan pengembangan SPAM

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk akses air minum aman

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap air minum aman

Meningkatnya kompetensi teknis pengelola SPAM (BUMD Air Minum, KPSPAMS, *Offtaker* SPAM Regional)

Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya kualitas air minum

Terwujudnya Regulasi Pemerintah Daerah terkait larangan penggunaan air tanah, dan beralih ke air minum aman

Tersusunnya regulasi terkait SPAM (Tarif BA BB bagi PDAM)

Tersusunnya regulasi zona konservasi air tanah

Tersedianya sumber air baku untuk pemanfaatan SPAM

tersedianya perlengkapan jalan

meningkatnya prasarana jalan berkeselamatan

Pohon Kinerja Keciptakaryaan Tahun 2025-2029

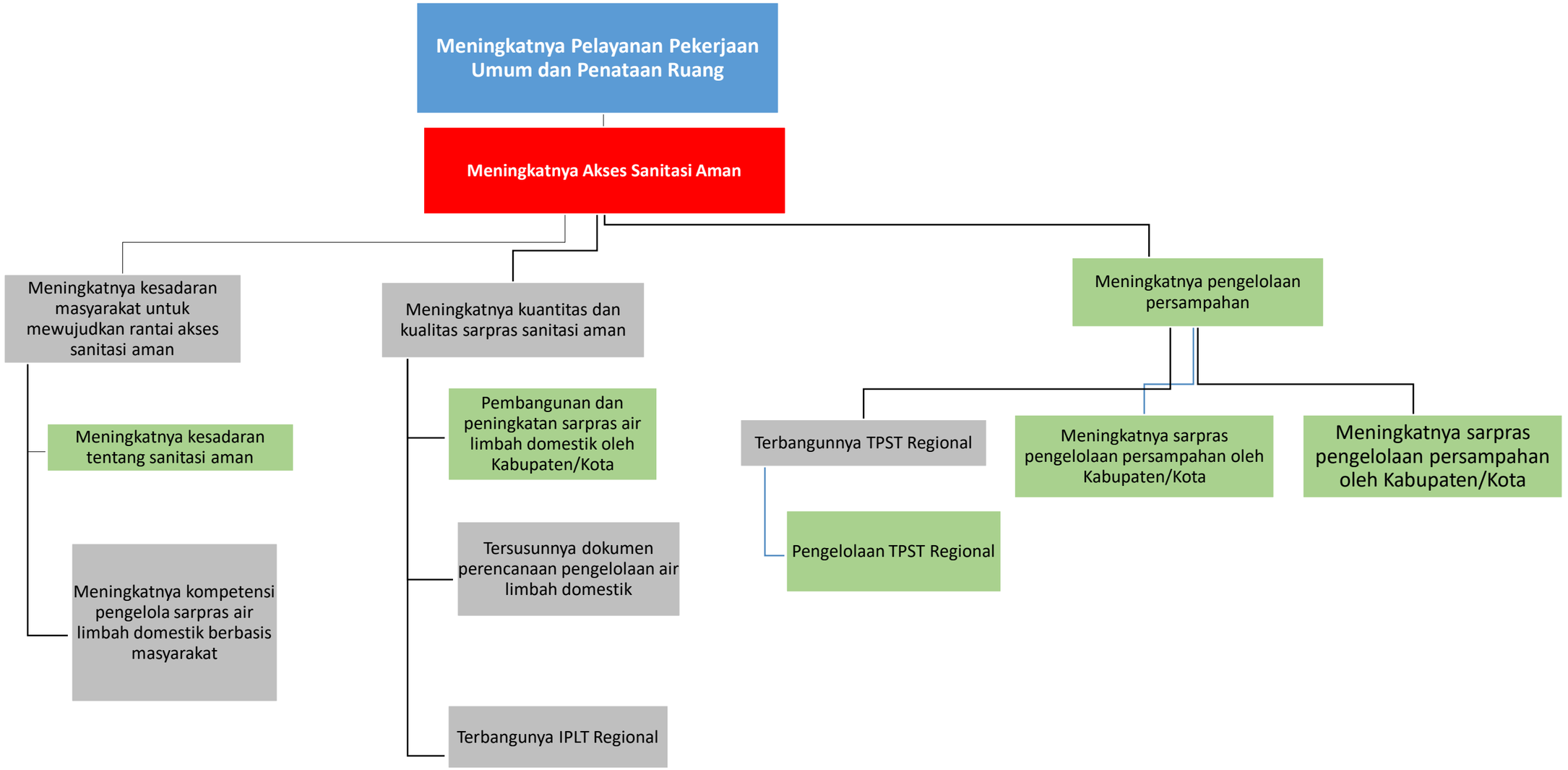

Pohon Kinerja Keciptakaryaan Tahun 2025-2029

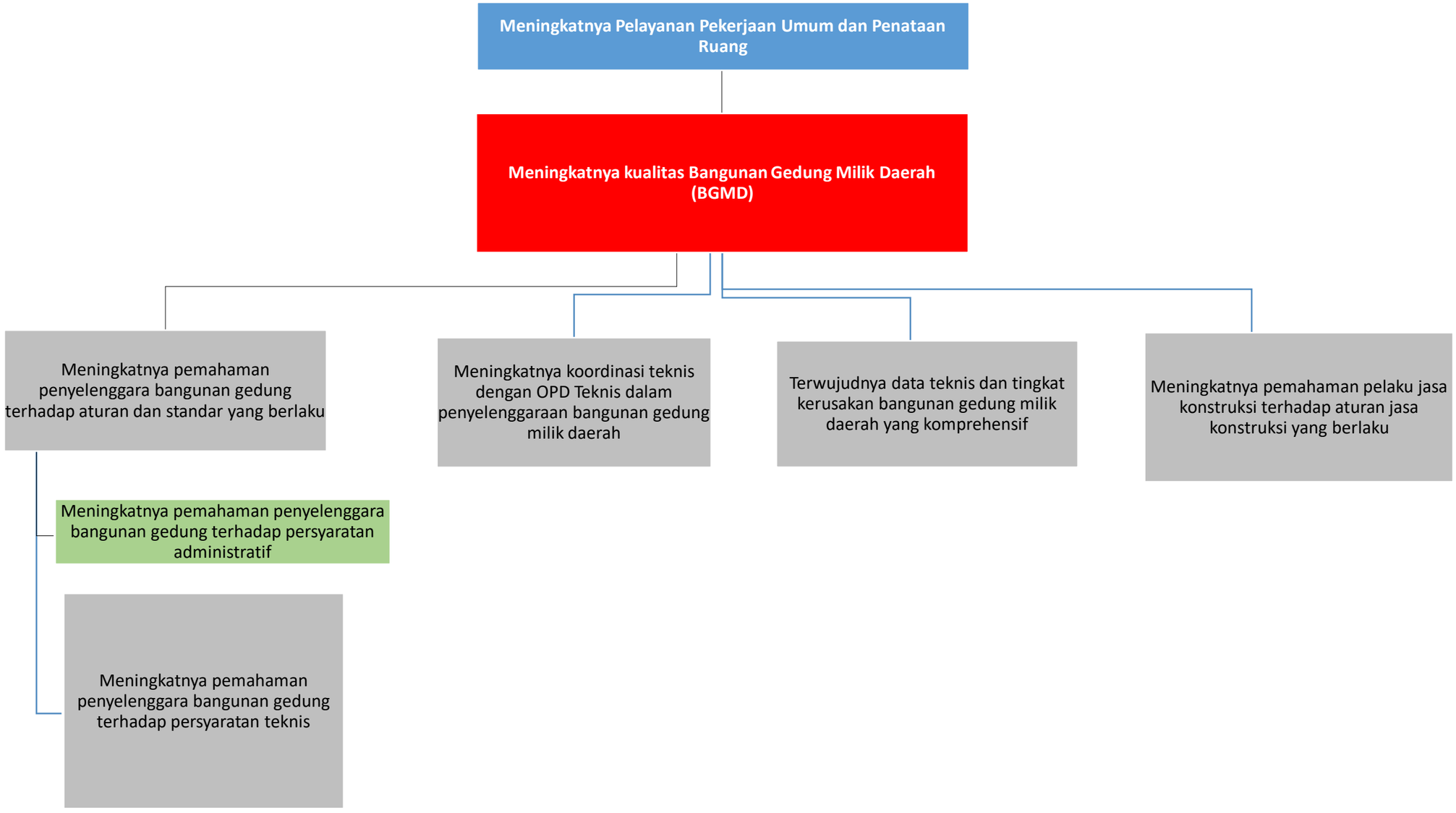

Pohon Kinerja Jasa Konstruksi Tahun 2025-2029

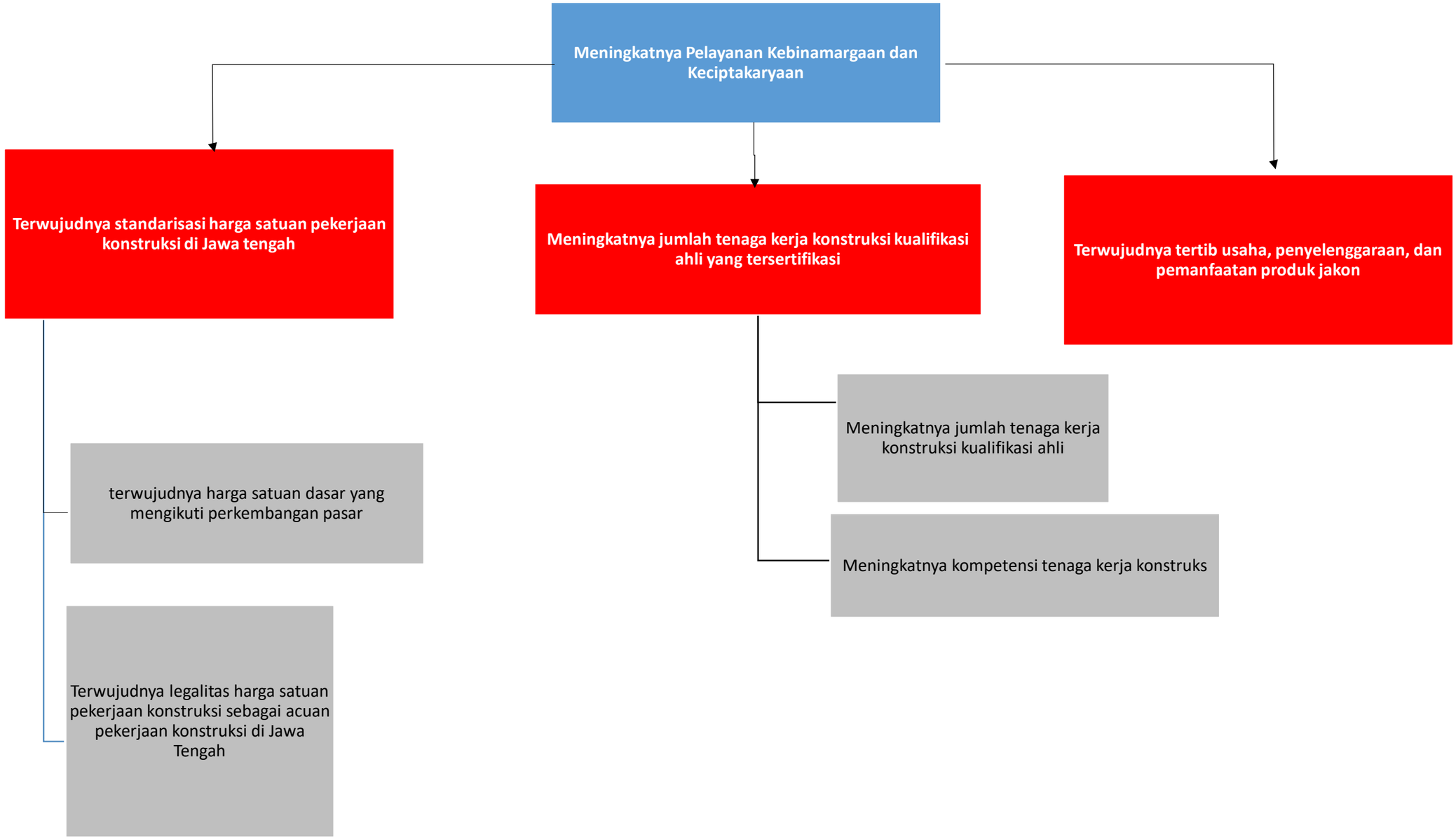

TUJUAN		
Kinerja Tujuan		
INDIKATOR		
Satuan		
Definisi Operasional		
Formulasi		
SASARAN		
Kinerja Sasaran	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Dokumen Pcerencanaan dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA	Meningkatn
INDIKATOR	**Persentase Penyediaan Rencana Teknis terhadap Rencana Pembangunan Infrastruktur SDA**	**Indek**
Satuan	**%**	
Definisi Operasional	Akumulasi jumlah dokumen rencana teknis terhadap kebutuhan rencana pembangunan infrastruktur SDA	Menghitung rata-rata hasil penilaian 6 kompone
Formulasi	(total jumlah ketersediaan dokumen / jumlah kebutuhan rencana pembangunan) X 100	Rata-rata hasil penilaian

PROGRAM	**Program Pengelolaan SDA**	
SASARAN /KINERJA PROGRAM	Tercapainya Penyusunan Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDA terhadap kebutuhan Konstruksi	
INDIKATOR	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDA Tahun N+1**	**Persentase Kondisi B**
Satuan	**%**	
Definisi Operasional	Mengukur Persentase capaian pemehuhan kebutuhan Dokumen Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDA pada Tahun N+1	Menghitung per
Formulasi	Persentase pemehuhan kebutuhan Dokumen Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDA pada Tahun N+1	Rata-rata hasil p
ORGANISASI ES 3	**Bidang Bina Teknik**	

KEGIATAN	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 3000 Ha dan Daera**	
SASARAN /KINERJA KEGIATAN	Tersedianya Data dan Dokumen Perencanaan Teknis Irigasi	Tersedianya Data dan Dokumen Perencanaan serta Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA	Meningkatnya Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi dan Pengelolaan Aset	Tersedianya Informasi Pengelolaan Irigasi Cakupan Provinsi	Tersedianya Informasi Pengelolaan Embung dan Pengelolaan Sungai Cakupan Provinsi	Meningkatnya Kondisi	
INDIKATOR	**Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi dan Pengelolaan Aset**	**Jumlah dokumen informasi Pengelolaan Irigasi**	**Jumlah Dokumen Informasi Pengelolaan Embung dan Pengelolaan Sungai**	**Jumlah DI yang direhab**	**Jumlah Dokumen pem kinerja sistem irigasi I**
Satuan	**Dokumen**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Dokumen**	**DI**	**doku**
Definisi Operasional	Akumulasi Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sana Prasarana Irigasi	Akumulasi Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA	Akumulasi Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi dan Pengelolaan Aset	Mengitung Jumlah dokumen informasi Pengelolaan Irigasi yang tersusun	Menghitung Jumlah Dokumen Informasi Pengelolaan Embung dan Pengelolaan Sungai yang tersusun	Akumulasi jumlah DI yang di rehab pada tahun berjalan	Akumulasi Jumlah Doku evaluasi kinerja
Formulasi	Akumulasi Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi	Akumulasi Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA	Akumulasi Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi dan Pengelolaan Aset	Jumlah dokumen informasi Pengelolaan Irigasi	Akumulasi Jumlah Dokumen Informasi Pengelolaan Embung dan Pengelolaan Sungai	Akumulasi jumlah DI yang di rehab pada tahun berjalan	Akumulasi Jumlah Doku evaluasi kinerja

ORGANISASI	**Pokja Studi dan Perencanaan Teknis**			**Seksi Pengelolaan Aset**	**Pokja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**			**Pokja PR IAB**	**Pokja Bin**
SUB KEGIATAN	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa**	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya**	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai**	**Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi**	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa**	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya**	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai**	**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	**Penyiapan, Pelaksana Aloka**
KINERJA SUB KEGIATAN	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Tersedianya Informasi Irigasi dan Rawa	Tersedianya Informasi Bendungan, Embung dan Penampung Air Lainnya	Tersedianya Informasi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Rencana Alokasi Ai
INDIKATOR	**Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun**	**Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun**	**Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun**	**Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Sistem Informasi Irigasi dan Rawa yang dikelola**	**Jumlah Sistem Informasi Bendungan, Embung dan Penampung Air Lainnya yang dikelola**	**Jumlah Sistem Informasi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang dikelola**	**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi**	**Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air**
Satuan	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**	**unit**	**unit**	**unit**	**KM**	**DI**
Definisi Operasional	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa mencakup penyusunan FS, desain, LARAP, UKL/UPL dan AMDAL	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya mencakup penyusunan FS, desain, LARAP, penyusunan UKL/UPL dan AMDAL	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai mencakup penyusunan FS, desain, LARAP, penyusunan UKL/UPL dan AMDAL	Meliputi Perizinan Pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, permasalahan dan penyelesaian Kasus dalam kegiatan Rekomtek Perizinan, Evaluasi Rekomtek, Implementasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Menghitung Jumlah Sistem Informasi Irigasi dan Rawa yang dikelola	Menghitung Jumlah Sistem Informasi Bendungan, Embung dan Penampung Air Lainnya yang dikelola	Menghitung Jumlah Sistem Informasi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang dikelola	Menghitung Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Menghitung Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air
Formulasi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Jumlah Sistem Informasi Irigasi dan Rawa yang dikelola	Jumlah Sistem Informasi Bendungan, Embung dan Penampung Air Lainnya yang dikelola	Jumlah Sistem Informasi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang dikelola	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air

Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Persentase Tingkat Kualitas Pelayanan SDA *		
%		
Menghitung Rata-rata Persentase Akumulasi Capaian Indikator Sasaran Pengelolaan SDA		
Rata-rata Persentase Akumulasi Capaian Indikator Sasaran Pengelolaan SDA		
Meningkatnya Pengelolaan SDA **		
nya Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Meningkatnya Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air	Meningkatnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi
s Kinerja Sistem Irigasi **	**Persentase Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air ****	**Indeks Kinerja Sistem Irigasi ****
angka	**%**	**angka**
en Indikator Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Menghitung rata-rata pengelolaan SDA	Menghitung rata-rata hasil penilaian 6 komponen Indikator Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah
6 komponen indikator kinerja sistem irigasi	((Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik) + (Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik) + (persentase realisasi kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi pada tahun berjalan terhadap target akhir tahun RPJMD)) / 3	Rata-rata hasil penilaian 6 komponen indikator kinerja sistem irigasi

Program Pengelolaan SDA		
Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya		
aik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	**Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi**	**Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik**
%	**m3**	**%**
sentase kondisi baik jaringan irigasi	Menghitung daya tampung Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Menghitung realisasi kondisi baik Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah
enilaian kondisi baik jaringan irigasi	Total kapasitas embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi dalam 1 tahun	Rata-rata persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik yang berada di Wilayah 6 Balai PSDA
Bidang Irigasi dan Air Baku		

Program Pengelolaan SDA		
Meningkatnya kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik		
Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik		
%		
Panjang sungai dalam kondisi baik terhadap total panjang sungai kewenangan provinsi		
(Panjang sungai dalam kondisi baik terhadap total panjang sungai kewenangan provinsi) x 100%		
Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai		

Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada emb BPSDA ...		
Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA ...		
angka		
Rata-rata hasil penilaian 6 komponen indikator kinerja sistem irigasi (IKSI) di Wilayah BPSDA		
Rata-rata hasil penilaian 6 komponen indikator kinerja sistem irigasi di Wilayah Balai PSDA		
4 BPSDA: BPSDA Pemali Comal BPSDA Jratun Seluna BPSDA Bengawan Solo BPSDA Serayu Bogowonto		

Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - h Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**			
Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi		Meningkatnya jumlah Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun			Meningkatnya Persentase Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau
antauan dan evaluasi kewenangan provinsi	**Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi**	**jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama**	**Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun**	**Persentase Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang direhab**	**Persentase Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau**
men	**dokumen**	**dokumen**	**unit**	**%**	**%**
umen pemantauan dan a sistem irigasi	Jumlah dokumen kegiaatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Akumulasi jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama	Akumulasi Jumlah Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun sampai dengan tahun berjalan	Menghitung persentase embung yang direhab dari total jumlah embung yang telah dibangun	Menghitung persentase embung dan penampungan air lainnya yang dievaluasi dan dipantau
umen pemantauan dan a sistem irigasi	Jumlah dokumen kegiaatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Akumulasi jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama	Akumulasi Jumlah Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun sampai dengan tahun berjalan	(Jumlah embung direhab pada tahun berjalan / jumlah total embung yang telah dibangun) X 100	Jumlah embung dan penampungan air lainnya yang dievaluasi dan dipantau pada tahun berjalan (tahun N) dibagi total jumlah embung dan penampungan air lainnya yang terbangun pada tahun sebelumnya (tahun N-1) X 100

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
Meningkatnya panjang sarpras sungai dan pantai yang terbangun	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam konservasi SDA	Tersusunnya dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Mempertahankan kondisi sarpras sungai	Tersedianya Data Teknis Sarana Prasarana SDA serta pengelolaan dan peringatan dini banjir
akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun	**Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA**	**Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi**	**Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir**	**Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Sarana Prasarana SDA, pengelolaan dan peringatan dini banjir**
KM	**kegiatan**	**Dokumen**	**KM**	**Dokumen**
akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Akumulasi Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir	Akumulasi Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Sarana Prasarana SDA, pengelolaan dan peringatan dini banjir
akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Akumulasi Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir	Akumulasi Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Sarana Prasarana SDA, pengelolaan dan peringatan dini banjir

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Mempertahankan kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA
Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA
%
Jumlah DI kondisi baik terhadap total jumlah DI di wilayah BPSDA (komponen IKSI)
Jumlah DI kondisi baik terhadap total jumlah DI di wilayah BPSDA (komponen IKSI)

a OP IAB	**Pokja Pemberdayaan Kelembagaan**		**Pokja PR IAB**		**Pokja Bina OP IAB**	
aan dan Pengawasan si Air	**Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA**	**Pembangunan Embung**	**Rehabilitasi Embung**	**Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku**	
ir yang Ditetapkan	Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Terbangunnya Embung untuk fungsi konservasi dan penyediaan air baku	Terehabilitasinya Embung	Beroperasi dan terpeliharanya unit air baku	Terlaksananya evaluasi dan pemantauan embung dan penampung air lainnya
Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	**Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya**	**Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan**	**Jumlah Embung yang Dibangun**	**Jumlah Embung yang Direhabilitasi**	**Jumlah unit air baku yang dioperasi dan dipelihara**	**Jumlah Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau**
Unit	**Lembaga**	**Lembaga**	**Unit**	**Unit**	**Unit**	**Unit**
Rencana Alokasi Air Tahunan yang disusun, dilaksanakan dan diawasi dengan memperhatikan ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau	Meliputi pelatihan, sosialisasi, Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi TKPSDA WS dan Dewan SDA Provinsi	Bangunan konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan serta sumber air lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan air. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Konstruksi embung, meliputi tubuh embung, kolam embung, bangunan pelimpah, alat sadap atau bangunan pengeluaran, serta jaringan distribusi. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru.	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi embung untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi/perbaikan	Meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin layanan unit air baku	Menghitung Jumlah Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau
Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dioperasi dan dipelihara	Jumlah Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau

Pokja PR SBP				**Pokja Bina OP SBP**		**Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi**		
Pembangunan Tanggul Sungai	**Pembangunan Check Dam**	**Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai**	**Normalisasi/Restorasi Sungai**	**Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi**	**Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi**	**Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai**	**Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)**	**Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi**
Terbangunnya Tanggul Sungai	Terbangunnya Check Dam	Terbangunnya Bangunan Pengamanan Pantai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Meningkatnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	**Jumlah Check Dam yang Dibangun**	**Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun**	**Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi**	**Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan**	**Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun**	**Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara**	**Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi**
KM	**Unit**	**KM**	**KM**	**Lembaga**	**dokumen**	**KM**	**Unit**	**Dokumen**
Menghitung Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Check Dam merupakan bangunan pelindung dari sedimen	Merupakan pekerjaan pembangunan baru. Bangunan pengamanan pantai yang dimaksud dapat berupa seawall, breakwater, tanggul pantai, dll	Operasi dan pemeliharaan sungai dan prasarana sungai, merupakan upaya dalam rangka menjamin keberlanjutan kondisi dan fungsi sungai dan prasarananya dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan masyarakat serta perlindungan terhadap sungai dan prasarananya sendiri.	Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi TKPSDA WS dan Dewan SDA Provinsi	Definisi dokumen pola dan rencana mengacu pada UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarana sungai	Flood Forecasting and Warning System (FFWS) atau sistem peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan ini dapat meliputi pembangunan instrumen yang dapat digunakan untuk peramalan debit banjir secara real time sehingga dapat dilakukan peringatan dini untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa. Instrumen FFWS yang dibangun meliputi pembangunan pos hidrologi, pos pemantauan debit air, termasuk pembangunan pusat kendali	Kegiatan ini meliputi pengumpulan, pengukuran aliran, mengolah dan valiadasi data serta menyimpan data hidrologi dan kualitas air
Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Jumlah Check Dam yang Dibangun	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air

Pokja OP (4 BPSDA) BPSDA Pemali Comal - BPSDA Jra BPSDA Bengawan Solo - BPSDA Sera
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA
KM
Menghitung Panjang seluruh Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah BPSDA

	persentase keterwujudan penataan ruang
	%
	Rata-rata capaian persentase ketersediaan rencana tata ruang, persentase implementasi pemanfaaatan ruang, dan persentase tertib
	Rata-rata capaian persentase ketersediaan rencana tata ruang, persentase implementasi pemanfaaatan ruang, dan persentase tertib

			Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang		
Meningkatnya Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Dokumen	Meningkatnya Persentase tertib ruang	Meningkatknya Persentase ketersediaan rencana tata ruang	Meningkatnya Persentase implementasi pemanfaaatan ruang	
Persentase Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air **	**Persentase Penyediaan Rencana Teknis terhadap Rencana**	**Persentase tertib ruang**	**Persentase ketersediaan rencana tata ruang**	**Persentase implementasi pemanfaaatan ruang**	
%	**%**	**%**	**%**	**%**	
Menghitung rata-rata pengelolaan SDA	Akumulasi jumlah dokumen rencana teknis terhadap kebutuhan rencana pembangunan infrastruktur SDA	Akumulasi persentase pelaksanaan pengawasan penataan ruang dan persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	Menghitung Rata - rata persentase ketersediaan dokumen tata ruang dan fasilitasi RTR Kab/Kota	Menghitung Akumulasi persentase rekomendasi pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program	
{(Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik) + (Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa	(total jumlah ketersediaan dokumen / jumlah kebutuhan rencana pembangunan) X 100	% pelaksanaan pengawasan penataan ruang + % pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	(Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang + Persentase Fasilitasi RTR Kab/ Kota) / 2	% rekomendasi pemanfaatan ruang + % pelaksanaan sinkronisasi program	

Program Pengelolaan SDA			**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**					**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**
ung dan penampung air lainnya di wilayah kerja	Terjaganya kondisi sungai kewenangan Provinsi di wilayah kerja BPSDA ...	Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan di BPSDA ...	Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA ...	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	Meningkatnya Fasilitasi RTR Kab/Kota	Meningkatnya rekomendasi pemanfaatan ruang	Meningkatnya pelaksanaan sinkronisasi program	
Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA ...	**Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA ...**	**Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di BPSDA ...**	**Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA ...**	**Persentase ketersediaan dokumen tata ruang**	**Persentase Fasilitasi RTR Kab/Kota**	**persentase rekomendasi pemanfaatan ruang**	**persentase pelaksanaan sinkronisasi program**	
%	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	
Jumlah kondisi baik embung dan penampung air lainnya terhadap total jumlahnya di wilayah BPSDA	Kondisi Fisik Sungai Kewenangan Provinsi di Wilayah BPSDA (N-1)	Realisasi ketersediaan dibanding rencana kebutuhan dokumen	Realisasi pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA	Akumulasi Jumlah Dokumen Perencanaan (Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi/ Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan),dan Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	{(Σ Realisasi Fasilitasi RTR Kab/Kota) / (Σ Target Pembinaan RTR Kab/Kota)} X 100%	perhitungan pembobotan realisasi penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang (40%)	akumulasi pembobotan penyusunan dokumen SPPR Provinsi (20%) dan pembinaan SPPR ke Kab/Kota (40%	perhit
(jumlah kondisi baik/ total jumlah embung) X 100	Hasil Penghitungan Kondisi Fisik Sungai Kewenangan Provinsi di Wilayah Balai PSDA (N-1)	(Realisasi/kebutuhan) X 100	Realisasi pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA	(Persentase RTR Provinsi) + (Persentase Dokumen Sosialisasi Penataan Ruang)	{(Σ Realisasi Fasilitasi RTR Kab/Kota) / (Σ Target Pembinaan RTR Kab/Kota)} X 100%	(Σ rekomendasi dikeluarkan / Σ permohonan rekomendasi) x 40%	(Σdokumen SPPR Provinsi x 20%) + (Σpembinaan SPPR x 40%)	
4 BPSDA: BPSDA Pemali Comal BPSDA Jratun Seluna BPSDA Bengawan Solo BPSDA Serayu Bogowonto	**2 BPSDA: BPSDA Pemali Comal BPSDA Jratun Seluna**	**4 BPSDA: BPSDA Pemali Comal BPSDA Jratun Seluna BPSDA Bengawan Solo BPSDA Serayu Bogowonto**	**4 BPSDA: BPSDA Pemali Comal BPSDA Jratun Seluna BPSDA Bengawan Solo BPSDA Serayu Bogowonto**					**Bidang Penataan Ruang**

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**		
Mempertahankan kinerja Embung dan Penampung Air Lainnya	Mempertahankan kondisi sarpras sungai	Tersedianya dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Tersedianya dokumen pemantauan pemanfaatan ruang	meningkatnya ketersediaan dokumen kegiatan perencanaan tata ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya dokumen implementasi pemanfaatan ruang	
Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	**Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA**	**Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA**	**Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA**	**Jumlah dokumen perencanaan tata ruang**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Jumlah dokumen implementasi pemanfaatan ruang**	
%	**%**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**	**dokumen**	
Jumlah sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara terhadap total jumlahnya di wilayah BPSDA	Realisasi pemeliharaan dibanding rencana kebutuhan pemeliharaan sungai di wilayah Balai PSDA	Jumlah akumulasi dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang	Akumulasi Jumlah Dokumen Perencanaan (Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi/ Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan),dan Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Akumulasi jumlah laporan pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan RTR Kab/Kota atau jumlah berita acara pembahasan RTR Kab/Kota atau SK Gubernur Hasil Evaluasi RTRW Kab/Kota atau surat hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR atau laporan Fasilitasi PSM penyusunan RTR dan jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Provinsi	Menghitung jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang tersusun pada tahun berjalan	Akumulasi Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan Dokumen Data dan Informasi untuk pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	
Jumlah sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara terhadap total jumlahnya di wilayah BPSDA	Realisasi pemeliharaan dibanding rencana kebutuhan pemeliharaan sungai di wilayah Balai PSDA	Jumlah akumulasi dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang	Akumulasi jumlah dokumen perencanaan (penetapan RTRW Provinsi atau jumlah dokumen arahan pengembangan kewilayahan) dan jumlah dokumen sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan pedoman bidang penaatan ruang	Akumulasi jumlah laporan pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan RTR Kab/Kota atau jumlah berita acara pembahasan RTR Kab/Kota atau SK Gubernur Hasil Evaluasi RTRW Kab/Kota atau surat hasil fasilitasi ranperkada RDTR atau laporan Fasilitasi PSM penyusunan RTR dan jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Provinsi	jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang tersusun pada tahun berjalan	Akumulasi Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan Dokumen Data dan Informasi untuk pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	

tun Seluna u Bogowonto	**Pokja OP (2 BPSDA) BPSDA Pemali Comal BPSDA Jratun Seluna**	**Pokja Dalguna (2 BPSDA) BPSDA Pemali Comal BPSDA Jratun Seluna**	**Pokja Dalguna (2 BPSDA) BPSDA Bengawan Solo BPSDA Serayu Bogowonto**	**Pokja Dalguna (4 BPSDA) BPSDA Pemali Comal - BPSDA Jratun Seluna BPSDA Bengawan Solo - BPSDA Serayu Bogowonto**	**Pokja PTR**				**Pokja PR**			
Operasi dan Pemeliharaan Embung	**Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai**	**Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi**		**Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang**	**Penetapan RTRW Provinsi**		**Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi**	**Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota**	**Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang**	**Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang**	**Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat**
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung	Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Perda RTRW Provinsi		Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksananya Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
Jumlah Embung yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA	**Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pedayagunaan SDA di BPSDA**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA**	**Jumlah Perda RTRW Provinsi**	**Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan**	**Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang**	**Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang**	**Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang**	**Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat**
Unit	**KM**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Dokumen**	**orang**	**Dokumen**	**Laporan**	**Laporan**	**Dokumen**	**Dokumen**	**Dokumen**
Meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air termasuk embung dan prasarananya	Meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarana sungai	Kegiatan ini meliputi pengumpulan, pengukuran aliran, mengolah dan validasi data serta menyimpan data hidrologi dan kualitas air	Menghitung Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA	Pelaksanaan koordinasi penataan ruang diantaranya melalui Forum Penataan Ruang Daerah (Permen ATR Nomor 9 Tahun 2022)	Penetapan RTRW Provinsi adalah penetapan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh gubernur (PP 21/2021). Proses yang dilakukan yaitu melakukan Penyempurnaan RTRW Provinsi hasil evaluasi antara pemerintah Provinsi dan DPRD dalam rangka penetapan perda RTRW Provinsi. Penetapan Perda RTRW Provinsi oleh Gubernur bersama DPRD dilaksanakan paling lama 2 bulan sejak mendapatkan Persetujuan Substansi.	Penyusunan Kajian Arahan Pengembangan Kewilayahan sebagai bagian dari sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan	Pelaksanaan kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan tentang substansi pengaturan bidang penataan ruang melalui tatap muka/media elektronik/media cetak/media lainnya (pasal 228 PP 21 Tahun 2021).	Penyusunan materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi merujuk pada Permen ATR/Ka BPN 11 Tahun 2021 Lampiran I Tata Cara Penyusunan dan Muatan RTRW Provinsi. Jangka waktu penyusunan dibatasi paling lama 12 bulan, terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW.	Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam penyusunan RTRW dan RDTR, sehingga kebijakan dan substansi yang diatur di kabupaten/kota selaras dengan kebijakan dan substansi pengaturan pada RTRW Provinsi.	Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang melalui Forum Penataan Ruang Daerah dan pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan untuk merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan sinkronisasi program penataan ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dalam rencana tata ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang terdiri dari jangka menengah (5 tahunan) dan jangka pendek (1 tahunan).	Penyediaan basis data dan informasi bidang penataan ruang dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik	1) Pengawasan penataan ruang dilakukan terhadap Pengaturan Penatan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan 2) Pengawasan penataan ruang dilakukan terhadap Pengaturan Penatan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 3) Pengawasan penataan ruang terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang 1. PP No. 21 Tahun 2021 2. Permen ATR/KaBPN No.21 Tahun 2021
Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA	Jumlah Perda RTRW Provinsi yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan yang tersusun	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang yang disusun	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat

) ruang
) ruang

Meningkatnya Persentase tertib ruang
Persentase tertib ruang
%
Menghitung Akumulasi persentase pelaksanaan pengawasan penataan ruang dan persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
% pelaksanaan pengawasan penataan ruang + % pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan penataan ruang	Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
persentase pelaksanaan pengawasan penataan ruang	**persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang**
%	**%**
tungan rerata realisasi pengawasan turbinlak, sistem informasi pengendalian, dan pengawasan stantek dikalikan 40%	perhitungan rerata realisasi penyusunan NSPK, pelaksanaan pengendalian, pemantauan /sanksi administratif, penilaian pelaksanaan KKPR, pembinaan kabupaten/kota dan pembinaan kepada masyarakat dikalikan 60%
{Σ (Realisasi pengawasan penataan ruang) /3} x 40%	{Σ (Realisasi pengendalian pemanfaatan ruang) /6} x 60%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	
Meningkatnya dokumen pengawasan penataan ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen pengendalian pemanfaatan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang
Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	**Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang**
dokumen	**dokumen**
Menghitung Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	Menghitung jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang
akumulasi Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	Akumulasi jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang

Pokja PPR		
Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	**Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK**	**Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang**
Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	**Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang**
Dokumen	**Dokumen**	**Dokumen**
1) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan terhadap kinerja pemenuhan standar teknis Penataan Ruang Kawasan. 2) Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan dilakukan kepada pengelola Kawasan 3) Pengelola kawasan terdiri atas : a. Badan usaha berbadan hukum b. Perangkat daerah c. Lembaga kemasyarakatan d. Orang perseorangan e. Pihak pengelola kawasan lainnya Permen No. 21 Tahun 2021, Pasal 255: a. kawasan b. kawasan c. kawasan d. kawasan perumahan dan permukiman e. kawasan perdagangan dan f. kawasan ruang terbuka g. kawasan pejalan dan/atau h. kawasan lainnya. 1. PP No. 21 Tahun 2021 2. Permen ATR/KaBPN No.21 Tahun 2021 3. Juknis pada masing-masing kawasan akan diatur dalam Peraturan Dirjen.	(1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan b. pemenuhan prosedur perolehan: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. (2) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK dilaksanakan untuk rnemastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK. Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan pada periode: a. selama dan b. pasca pembangunan. (3) Detail pelaksanaan penilaian KKPR yang tertuang dalam Permen ATR/Ka BPN 21 tahun 2021	Pelaksanaan koordinasi penataan ruang diantaranya melalui Forum Penataan Ruang Daerah (Permen ATR Nomor 9 Tahun 2022)
Jumlah Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan yang tersusun	Jumlah Dokumen Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Mantap
%
Mengukur Capaian Panjang Jalan Provinsi Sebagai Jalan Kolektor Dengan Kondisi Permukaan Mantap Terhadap Panjang Jalan Provinsi
(Panjang jalan Provinsi sesuai standar jalan kolektor dengan kondisi permukaan mantap/ total panjang Provinsi) x 100%

Terjaganya Kondisi Jalan Mantap
Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor
%
Mengukur Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor S.D Tahun N (sesuai Perda) terhadap Panjang Jalan Provinsi Seluruhnya
(Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor S.D Tahun N / Panjang Jalan Provinsi Seluruhnya) X 100%

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	**Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan**
KM	**%**
Mengukur Capaian Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor (Lebar 7 m dan Muatan Sumbu Terberat 8 Ton)	Mengukur capaian dokumen pengawasan penyelenggaraan jalan dalam satu tahun
Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	(Jumlah capaian dokumen pengawasan dalam tahun n / (Jumlah rencana dokumen pengawasan dalam tahun n) x 100%
BIDANG BINA MARGA	

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	**Persentase Panjang Jalan yang Dileger**
%	%
Mengukur capaian penyusunan perencanaan teknis jalan dan jembatan	Mengukur capaian panjang jalan yang sudah dilegerkan tehadap seluruh total panjang jalan Provinsi Jawa Tengah
(Jumlah Capaian Dokumen Perencanaan teknis Jalan dan Jembatan pada Tahun N / Jumlah Target Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan pada Tahun N) X 100%	(Total Panjang Jalan yang Sudah Dileger /Total Panjang Jalan Provinsi Seluruhnya) X 100%
BIDANG BINA TEKNIK	

Terpenuhinya ketersediaan perala	
perangkat daer	
Persentase Pemenuh	
%	
Mengukur capaian ketersediaa	
kegiatan perangkat	
Jumlah Kumulatif Ketersediaa	
Kumulatif Target Kebutuhan	
Perencan	

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor	**Jumlah dokumen pengawasan teknis kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**
KM	Dokumen
Mengukur Capaian Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor	Mengukur capaian Jumlah dokumen pengawasan teknis kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor	Jumlah dokumen pengawasan teknis kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	**Panjang Jalan yangDilegerkan S.d Tahun-N (KM)**
Dokumen	KM
ukur capaian Dokumen Perencanaan Jalan Jembatan dan survey kondisi jalan jem	Mengukur capaian Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N (KM)
lah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan) + (survey kondisi jalan dan jemba	Panjang Jalan yangDilegerkan S.d Tahun-N (KM)

Terlaksananya Penyel	
Jumlah Peralat	
Mengukur Jumlah P	
Jumlah Peralatan	

Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I **Pokja Pelaksana Jalan Wilayah II**						**Pokja Pengawasan**
Rekonstruksi Jalan	**Pembangunan Underpass**	**Pelebaran Jalan Menuju Standar**	**Pembangunan Jembatan**	**Pembangunan Flyover**	**Pembangunan Jalan**	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
Terekonstruksinya Jalan	Terlaksananya Pembangunan Underpass	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standa	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Flyover	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
Panjang Jalan yang Direkonstruksi	**Panjang Underpass yang Dibangun**	**Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar**	**Panjang jembatan yang dibangun**	**Panjang Flyover yang Dibangun**	**Panjang Jalan yang Dibangun**	**Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi**
KM	**Meter**	**KM**	**Meter**	**Meter**	**KM**	**KM**
Mengukur capaian panjang Jalan yang Direkonstruksi	Mengukur Capaian Panjang Underpass yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Mengukur Capaian Panjang jembatan yang dibangun	Mengukur Capaian Panjang Flyover yang Dibangun	Mengukur Capaian Panjang Jalan yang Dibangun	mengukur capaian Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi
Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Panjang Underpass yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Panjang jembatan yang dibangun	Panjang Flyover yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi

Pokja Studi dan Perencanaan Teknis				**Seksi Pen**	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		**Survey Kondisi Jalan/Jembatan**	**Pengelolaan Leger Jalan**	**Pemelihara**	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terselenggarannya pengelolaan aset	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Terkelolanya Leger Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	**Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan dan jembatan**	**Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya**	**Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola**	**Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin**	**Jumlah Peralatan bertambah**
Dokumen	**M2**	**Km**	**Dokumen**	**KM**	**Unit**
Mengukur Capaian Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Mengukur Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan dan jembatan	Mengukur Capaian Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Mengukur Capaian Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Mengukur Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Mengukur Jumlah Peralatan yang bertambah
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan dan jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jumlah Peralatan bertambah (unit)

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
latan alat berat pendukung kegiatan ah yang disediakan	Terpenuhinya jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi dalam satu tahun terhadap jumlah kumulatif sertifikat hasil uji tahun rencana
ıan Kebutuhan Peralatan	**Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi**
%	%
ın peralatan alat berat pendukung daerah yang disediakan	Mengukur capaian jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi dalam satu tahun terhadap jumlah kumulatif sertifikat hasil uji tahun rencana
n Alat Berat S.D Tahun N / Jumlah ı Alat Berat Sampai Akhir Tahun aan)X 100%)	(Jumlah komulatif capaian Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi s.dTahun N / Jumlah target komulatif Sertifikat Hasil Uji tahun akhir rencana) X100%
BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	
enggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi
tan yang Tersedia	**Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi (Sertifikat)**
Unit	Sertifikat
eralatan yang Tersedia	Mengukur Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi
yang Tersedia (Unit)	Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi (Sertifikat)

ugujian Mutu		Seksi Peralatan dan Alat Berat					
aan Rutin Jalan		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi					
Terlaksanaan ya Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
Jumlah Peralatan bertambah	**Jumlah persediaan bahan/material konstruksipenanganan kerusakan khusus (Unit)**	**Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya**	**Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO9001 (Dokumen)**	**Jumlah pemeliharaan alat uji (Unit)**	**Jumlah penambahan alat uji (Unit)**	**Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu (Orang)**	**Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi (Sertifikat)**
Unit	**Unit**	**Km**	**Dokumen**	**Unit**	**Unit**	**Orang**	**Sertifikat**
Mengukur Jumlah Peralatan yang dipelihara	Mengukur Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus	Mengukur Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Mengukur Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO9001 (Dokumen)	Mengukur Jumlah pemeliharaan alat uji (Unit)	Mengukur Jumlah penambahan alat uji (Unit)	Mengukur Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu (Orang)	Mengukur Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi (Sertifikat)
Jumlah Peralatan yang dipelihara (unit)	Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus (unit)	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO9001 (Dokumen)	Jumlah pemeliharaan alat uji (Unit)	Jumlah penambahan alat uji (Unit)	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu (Orang)	Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi (Sertifikat)

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Semarang
Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	**Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di BPJ Wilayah Semarang**
%	%
Mengukur capaian panjang jalan Provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang dalam satu tahun terhadap panjang jalan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang	Mengukur capaian panjang jalan provinsi dengan nilaiKeratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Semarang
(Total Panjang Jalan Provinsi Kondisi PermukaanMantap di BPJ Wilayah Semarang Tahun Ke-N/Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang)X100%	(Total Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai IRI JalanMantap di BPJ Wilayah SemarangTahun Ke-N / Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang) X 100%
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SEMARANG	

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI		
Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Semarang
Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	**Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang**	**Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Semarang**
Km	Unit	Km
Mengukur Capaian Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang Dalam satu Tahun	Mengukur Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap Tahun ke N di BPJ Wilayah Semarang
Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap tahun ke N di BPJ Wilayah Semarang	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik Tahun Ke N di BPJ Wilayah Semarang	Mengukur Capaian Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Semarang dalam satu tahun

Pokja Wilayah I Pokja Wilayah II						
Rehabilitasi Jalan			**Pelebaran Jembatan**	**Rehabilitasi Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jalan**
Terehabilitasinya Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terlaksanaya Pelebaran Jembatan	Terlaksanaya Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan
Panjang Jalan yang Direhabilitas	**Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang**	**Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang**	**Panjang jembatan yang dilebarkan**	**Panjang Jembatan yang Direhabilitasi**	**Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin**	**Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin**
Km	**Km**	**Km**	**Meter**	**Meter**	**Meter**	**Km**
Mengukur Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang	Mengukur Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang	Mengukur Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang	Mengukur Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Semarang	Mengukur Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang	Mengukur Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Semarang	Mengukur Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Semarang
Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang (KM)	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang (KM)	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang	Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Semarang	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Semarang	Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Semarang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Semarang (KM)

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Pati
Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati	**Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di BPJ Wilayah Pati**
%	%
Mengukur capaian panjang jalan Provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati dalam satu tahun terhadap panjang jalan Provinsi di BPJ Wilayah Pati	Mengukur capaian panjang jalan provinsi dengan nilaiKeratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Pati
(Total Panjang Jalan Provinsi Kondisi PermukaanMantap di BPJ Wilayah Pati Tahun Ke-N/Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Pati)X100%	(Total Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai IRI JalanMantap di BPJ Wilayah PatiTahun Ke-N / Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Pati) X 100%
BALAI PENGELOLA JALAN WILAYAH PATI	

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI		
Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Pati
Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati	**Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati**	**Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Pati**
Km	Unit	Km
Mengukur Capaian Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati Dalam satu Tahun	Mengukur Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati	Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap Tahun ke N di BPJ Wilayah Pati
Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap tahun ke N di BPJ Wilayah Pati	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik Tahun Ke N di BPJ Wilayah Pati	Mengukur Capaian Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Pati dalam satu tahun

Pokja Wilayah I Pokja Wilayah II						
Rehabilitasi Jalan			**Pelebaran Jembatan**	**Rehabilitasi Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jalan**
Terehabilitasinya Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terlaksanaya Pelebaran Jembatan	Terlaksanaya Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan
Panjang Jalan yang Direhabilitas	**Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati**	**Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati**	**Panjang jembatan yang dilebarkan**	**Panjang Jembatan yang Direhabilitasi**	**Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin**	**Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin**
Km	**Km**	**Km**	**Meter**	**Meter**	**Meter**	**Km**
Mengukur Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati	Mengukur Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati	Mengukur Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati	Mengukur Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Pati	Mengukur Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati	Mengukur Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Pati	Mengukur Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Pati
Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati (KM)	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati (KM)	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati	Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Pati	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Pati	Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Pati	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Pati (KM)

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi
%
Mengukur capaian panjang jalan Provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi dalam satu tahun terhadap panjang jalan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi
(Total Panjang Jalan Provinsi Kondisi PermukaanMantap di BPJ Wilayah Purwodadi Tahun Ke-N/Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi)X100%
BALAI PENGELOLA JALAN WILAYAH PURWODADI

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	
Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi
Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	**Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi**
Km	Unit
Mengukur Capaian Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi Dalam satu Tahun	Mengukur Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi
Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap tahun ke N di BPJ Wilayah Purwodadi	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik Tahun Ke N di BPJ Wilayah Purwodadi

Pokja Wilayah I Pokja Wilayah II						
Rehabilitasi Jalan			**Pelebaran Jembatan**	**Rehabilitasi Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jalan**
Terehabilitasinya Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terlaksanaya Pelebaran Jembatan	Terlaksanaya Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan
Panjang Jalan yang Direhabilitas	**Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi**	**Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi**	**Panjang jembatan yang dilebarkan**	**Panjang Jembatan yang Direhabilitasi**	**Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin**	**Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin**
Km	**Km**	**Km**	**Meter**	**Meter**	**Meter**	**Km**
Mengukur Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi	Mengukur Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi	Mengukur Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi	Mengukur Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Purwodadi	Mengukur Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi	Mengukur Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi	Mengukur Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi
Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi (KM)	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi (KM)	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi	Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Purwodadi	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Purwodadi	Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi (KM)

Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Mantap

%

Mengukur Capaian Panjang Jalan Provinsi Sebagai Jalan Kolektor Dengan Kondisi Permukaan Mantap Terhadap Panjang Jalan Provinsi

(Panjang jalan Provinsi sesuai standar jalan kolektor dengan kondisi permukaan mantap/ total panjang Provinsi) x 100%

Terjaganya Kondisi Jalan Mantap

- Persentase Panjang Jaian Provinsi Kondisi Permukaan Mantap

- Mengukur Capaian Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap terhadap Total Panjang Jalan Provinsi
- Mengukur Capaian Keratаan Jalan Provinsi Yang Dijaga Dalam Kondisi Permukaan Mantap Terhadap Panjang Jalan Provinsi Jawa Tengah Seluruhnya

- (Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap / Total Panjang Jalan Provinsi) X 100%
(Total Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai IRI Jalan Mantap Tahun Ke-N/Total Panjang Jalan Provinsi)X100%

	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	
Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Magelang	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Terjaganya Kondisi Permukaan Ja
Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	**Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta**	**Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta**	**Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang**	**Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di BPJ Wilayah Magelang**	**Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo**	**Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo**	**Persentase Panjang Jalan Provin**
%	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**	
Mengukur capaian panjang jalan provinsi dengan nilaiKeratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Mengukur capaian panjang jalan Provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta dalam satu tahun terhadap panjang jalan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta	Mengukur capaian panjang jalan provinsi dengan nilaiKeratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Mengukur capaian panjang jalan Provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang dalam satu tahun terhadap panjang jalan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang	Mengukur capaian panjang jalan provinsi dengan nilaiKeratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Magelang	Mengukur capaian panjang jalan Provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo dalam satu tahun terhadap panjang jalan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo	Mengukur capaian panjang jalan provinsi dengan nilaiKeratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Mengukur capaian panjang jalan Pro dalam satu tahun terhada
(Total Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai IRI JalanMantap di BPJ Wilayah PurwodadiTahun Ke-N / Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi) X 100%	(Total Panjang Jalan Provinsi Kondisi PermukaanMantap di BPJ Wilayah Surakarta Tahun Ke-N/Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta)X100%	(Total Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai IRI JalanMantap di BPJ Wilayah SurakartaTahun Ke-N / Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta) X 100%	(Total Panjang Jalan Provinsi Kondisi PermukaanMantap di BPJ Wilayah Magelang Tahun Ke-N/Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang)X100%	(Total Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai IRI JalanMantap di BPJ Wilayah MagelangTahun Ke-N / Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang) X 100%	(Total Panjang Jalan Provinsi Kondisi PermukaanMantap di BPJ Wilayah Wonosobo Tahun Ke-N/Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo)X100%	(Total Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai IRI JalanMantap di BPJ Wilayah WonosoboTahun Ke-N / Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo) X 100%	(Total Panjang Jalan Provinsi Kondi N/Total PanjangJala
	BALAI PENGELOLA JALAN WILAYAH SURAKARTA		**BALAI PENGELOLA JALAN WILAYAH MAGELANG**		**BALAI PENGELOLA JALAN WILAYAH WONOSOBO**		
	PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI			**PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**			**PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**			
Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Magelang	Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Terjaganya jalan provinsi kondisi Per di BPJ Wilayah Cilaca
Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	**Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta**	**Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta**	**Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Surakarta**	**Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang**	**Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang**	**Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Magelang**	**Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo**	**Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo**	**Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo**	**Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga Permukaan Mantap di BPJ Wila**
Km	Km	Unit	Km	Km	Unit	Km	Km	Unit	Km	Km
Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap Tahun ke N di BPJ Wilayah Purwodadi	Mengukur Capaian Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta Dalam satu Tahun	Mengukur Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta	Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap Tahun ke N di BPJ Wilayah Surakarta	Mengukur Capaian Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang Dalam satu Tahun	Mengukur Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang	Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap Tahun ke N di BPJ Wilayah Magelang	Mengukur Capaian Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo Dalam satu Tahun	Mengukur Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo	Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap Tahun ke N di BPJ Wilayah Wonosobo	Mengukur Capaian Panjang Jalan Pro dalam Kondisi Permukaan Mantap Cilacap Dalam satu Tah
Mengukur Capaian Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi dalam satu tahun	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap tahun ke N di BPJ Wilayah Surakarta	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik Tahun Ke N di BPJ Wilayah Surakarta	Mengukur Capaian Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Surakarta dalam satu tahun	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap tahun ke N di BPJ Wilayah Magelang	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik Tahun Ke N di BPJ Wilayah Magelang	Mengukur Capaian Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Magelang dalam satu tahun	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap tahun ke N di BPJ Wilayah Wonosobo	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik Tahun Ke N di BPJ Wilayah Wonosobo	Mengukur Capaian Panjang jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo dalam satu tahun	Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga Permukaan Mantap tahun ke N d Cilacap
	Pokja Wilayah I Pokja Wilayah II						**Pokja Wilayah I Pokja Wilayah II**						**Pokja Wilayah I Pokja Wilayah II**							
Pemeliharaan Rutin Jalan	**Rehabilitasi Jalan**			**Pelebaran Jembatan**	**Rehabilitasi Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jalan**	**Rehabilitasi Jalan**			**Pelebaran Jembatan**	**Rehabilitasi Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jalan**	**Rehabilitasi Jalan**			**Pelebaran Jembatan**	**Rehabilitasi Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jalan**	**Rehabilitasi Jalan**	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Terehabilitasinya Jalan
Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	**Panjang Jalan yang Direhabilitas**	**Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta**	**Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta**	**Panjang jembatan yang dilebarkan**	**Panjang Jembatan yang Direhabilitasi**	**Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin**	**Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin**	**Panjang Jalan yang Direhabilitas**	**Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang**	**Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang**	**Panjang jembatan yang dilebarkan**	**Panjang Jembatan yang Direhabilitasi**	**Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin**	**Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin**	**Panjang Jalan yang Direhabilitasi**	**Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo**	**Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo**	**Panjang jembatan yang dilebarkan**	**Panjang Jembatan yang Direhabilitasi**	**Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin**	**Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin**	**Panjang Jalan yang Direhabilitasi**	**Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap**
Km	**Km**	**Km**	**Km**	**Meter**	**Meter**	**Meter**	**Km**	**Km**	**Km**	**Km**	**Meter**	**Meter**	**Meter**	**Km**	**Km**	**Km**	**Km**	**Meter**	**Meter**	**Meter**	**Km**	**Km**	**Km**
Mengukur Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi	Mengukur Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta	Mengukur Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta	Mengukur Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta	Mengukur Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Surakarta	Mengukur Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta	Mengukur Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta	Mengukur Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta	Mengukur Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang	Mengukur Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang	Mengukur Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang	Mengukur Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Magelang	Mengukur Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang	Mengukur Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang	Mengukur Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang	Mengukur Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo	Mengukur Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo	Mengukur Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo	Mengukur Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Wonosobo	Mengukur Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo	Mengukur Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo	Mengukur Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo	Mengukur Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap	Mengukur Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap
Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi (KM)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta (KM)	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta (KM)	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta	Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Surakarta	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Surakarta	Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta (KM)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang (KM)	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang (KM)	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang	Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Magelang	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang	Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang (KM)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo (KM)	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo (KM)	Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo	Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Wonosobo	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Wonosobo	Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo (KM)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap (KM)	Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap (KM)

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
lan Mantap di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	
si Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap	**Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap**	
%	%	
ovinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap p panjang jalan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap	Mengukur capaian panjang jalan provinsi dengan nilaiKerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	
isi PermukaanMantap di BPJ Wilayah Cilacap Tahun Ke- n Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap)X100%	(Total Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai IRI JalanMantap di BPJ Wilayah CilacapTahun Ke-N / Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap) X 100%	
BALAI PENGELOLA JALAN WILAYAH CILACAP		
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI		
mukaan mantap p	Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Cilacap
dalam Kondisi ıyah Cilacap	**Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap**	**Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Cilacap**
Unit		Km
vinsi yang Dijaga di BPJ Wilayah ıun	Mengukur Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap Tahun ke N di BPJ Wilayah Cilacap
dalam Kondisi i BPJ Wilayah	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik Tahun Ke N di BPJ Wilayah Cilacap	Mengukur Capaian Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Cilacap dalam satu tahun
Pokja Wilayah I Pokja Wilayah II		
	Pelebaran Jembatan	**Rehabilitasi Jembatan**
Terehabilitasinya Jalan	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Terlaksanaya Rehabilitasi Jembatan
Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap	**Panjang jembatan yang dilebarkan**	**Panjang Jembatan yang Direhabilitasi**
Km	**Meter**	**Meter**
Mengukur Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap	Mengukur Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Cilacap	Mengukur Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap
Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap	Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Cilacap	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Tegal	
Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal	**Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di BPJ Wilayah Tegal**	
%	%	
Mengukur capaian panjang jalan Provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal dalam satu tahun terhadap panjang jalan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal	Mengukur capaian panjang jalan provinsi dengan nilaiKerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Tegal	
(Total Panjang Jalan Provinsi Kondisi PermukaanMantap di BPJ Wilayah Tegal Tahun Ke-N/Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal)X100%	(Total Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai IRI JalanMantap di BPJ Wilayah TegalTahun Ke-N / Total PanjangJalan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal) X 100%	
BALAI PENGELOLA JALAN WILAYAH TEGAL		
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI		
Terjaganya jalan provinsi kondisi Permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	Terjaganya jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Tegal
Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal	**Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Tegal**	**Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Tegal**
Km	Unit	Km
Mengukur Capaian Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal Dalam satu Tahun	Mengukur Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Tegal	Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap Tahun ke N di BPJ Wilayah Tegal
Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap tahun ke N di BPJ Wilayah Tegal	Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik Tahun Ke N di BPJ Wilayah Tegal	Mengukur Capaian Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Tegal dalam satu tahun
Pokja Wilayah I Pokja Wilayah II		
Rehabilitasi Jalan	**Pelebaran Jembatan**	**Rehabilitasi Jembatan**
Terehabilitasinya Jalan	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Terlaksanaya Rehabilitasi Jembatan
Panjang Jalan yang Direhabilitas	**Panjang jembatan yang dilebarkan**	**Panjang Jembatan yang Direhabilitasi**
Km	**Meter**	**Meter**
Mengukur Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Tegal	Mengukur Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Tegal	Mengukur Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Tegal
Panjang Jalan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Tegal (KM)	Panjang jembatan yang dilebarkan di BPJ wilayah Tegal	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Tegal

Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Aman		
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman		
%		
Mengukur Capaian Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Aman Terhadap Jumlah Rumah Tangga Di Jawa Tengah		
(Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Sumber Air Minum Aman Tahun N / Jumlah Rumah Tangga Di Jawa Tengah Tahun N) X 100 %		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Meningkatnya kapasitas akses air minum	Meningkatnya kapasitas akses air minum	Meningkatnya kapasitas akses air minum
Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	**Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan**	**Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan**
%	%	%
Mengukur capaian kapasitas yang dapat terlayani air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Mengukur capaian rumah tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Mengukur capaian rumah tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan
(Jumlah Kapasitas yang dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota) / (Jumlah Kebutuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab./Kota)x100%)	(Jumlah Rumah Tangga di Jawa Tengah Yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-n/Jumlah rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah)x100%	(Jumlah Rumah Tangga dengan akses air siap minum JP PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL) / Jumlah RT dengan aksesair minum JP PDAM)x 100%
BIDANG CIPTA KARYA		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Meningkatnya Kapasitas Yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota	Meningkatnya Sambungan Rumah Di Jawa Tengah Yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Sambungan Rumah yang mengakses air minum jaringan perpipaan PDAM bersumber dari SPAM Regional
Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota (Liter/ Detik)	**Jumlah Sambungan Rumah di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Rumah Tangga)**	**Jumlah Sambungan Rumah yang mengakses air minum jaringan perpipaan PDAM bersumber dari SPAM Regional**
Liter/Detik	Sambungan Rumah (SR)	Sambungan Rumah (SR)
Mengukur Capaian kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota dalam satu tahun (Liter/ Detik)	Mengukur Jumlah Sambungan Rumah di Jawa Tengah dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Mengukur Jumlah Sambungan Rumah yang mengakses air minum jaringan perpipaan PDAM bersumber dari SPAM Regional (Rumah Tangga/Sambungan Rumah)
Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota (Liter/ Detik)	Jumlah Sambungan Rumah di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Rumah Tangga)	Jumlah Sambungan Rumah yang mengakses air minum jaringan perpipaan PDAM bersumber dari SPAM Regional
Pokja Pengembangan Air Minum		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	**Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota**
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	**Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun**	**Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**
Dokumen	**Liter/Detik**	**Kabupaten/Kota**
Mengukur Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	Mengukur Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	Mengukur Jumlah Kabupaten/Kota yan Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kab/Kota)
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	Jumlah Kabupaten/Kota yan Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kab/Kota)

PROGRAM PEN		
Meningkatnya kapasitas akses air limbah domestik		
Persentase Rumah Tangga yang dapat terlayani IPLT lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan Rumah Tangga di area pelayanan IPLT lintas kabupaten/kota		
%		
Mengukur Capaian Persentase Rumah Tangga yang dapat terlayani IPLT lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan Rumah Tangga di area pelayanan IPLT lintas kabupaten/kota		
(Jumlah Rumah Tangga terlayani IPLT lintas kabupaten/kota / Jumlah Rumah Tangga di area pelayanan IPLT lintas kabupaten/kota) x 100%		
Pengelolaan da		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		
Jumlah Rumah Tangga terlayani IPLT lintas kabupaten/kota (Rumah Tangga)		
Rumah Tangga		
Mengukur Jumlah Rumah Tangga terlayani IPLT lintas kabupaten/kota (Rumah Tangga)		
Jumlah Rumah Tangga terlayani IPLT lintas kabupaten/kota (Rumah Tangga)		
Pok		
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat		
Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun		
M³/Hari		
Mengukur Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun (m³/hari)		
Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun (m³/hari)		

Rehabilitasi Jembatan	**Pemeliharaan Rutin Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jalan**		
Terlaksanaya Rehabilitasi Jembatan	Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan		
Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	**Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin**	**Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin**		
Meter	**Meter**	**Km**		
Mengukur Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap	Mengukur Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap	Mengukur Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap		
Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Cilacap	Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap (KM)		
Rehabilitasi Jembatan	**Pemeliharaan Rutin Jembatan**	**Pemeliharaan Rutin Jalan**		
Terlaksanaya Rehabilitasi Jembatan	Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan		
Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	**Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin**	**Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin**		
Meter	**Meter**	**Km**		
Mengukur Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Tegal	Mengukur Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal	Mengukur Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal		
Panjang Jembatan yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Tegal	Panjang Jembatan yang Dipelihara secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal (KM)		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	**Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota**		**Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	**Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun**	**Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**	**Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Perdesaan**	**Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa (lokasi)**	**Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi**
Dokumen	**Liter/Detik**	**Kabupaten/Kota**	**Kabupaten/Kota**	**Lokasi**	**Unit**
Mengukur Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	Mengukur Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	Mengukur Jumlah Kabupaten/Kota yan Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kab/Kota)	Mengukur Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Perdesaan (Orang)	Mengukur Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa (lokasi)	Mengukur Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Regional
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	Jumlah Kabupaten/Kota yan Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Kab/Kota)	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (Orang)	Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa (lokasi)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi

Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indeks Pelayanan Keciptakaryaan

%

Mengukur Rata Rata Capaian Capaian Indikator air minum aman, sanitasi aman, Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar

(Capaian Indikator air minum aman + sanitasi aman + Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar)/3 x 100%

Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Aman

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

%

Mengukur Capaian Rumah Tangga Dengan Akses Air Limbah Domestik Aman Terhadap Jumlah Rumah Tangga Di Jawa Tengah

(Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Aman/ Jumlah Rumah Tangga Di Jawa Tengah) X 100%

Meningkatnya kualitas hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD)

Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) Dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standa

Mengukur Capaian Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) Prov. Jateng Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis Sampai Dengan Tahun N terhadap Jumlah Total Komp

((Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis Sampai Dengan Tahun N / Jumlah Total Komplek BGMD Prov. Jawa Tengah)

GELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	P
Meningkatnya kapasitas akses air limbah domestik	Terselenggaranya Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Terselenggaranya Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	
Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan pembinaan dan pemberdayaan	**Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun**	**Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n**	**Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi**	**Persentase Jum**
%	**%**	**%**	**%**	
Mengukur Capaian Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan pembinaan dan pemberdayaan	Mengukur Capaian Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun	Mengukur Capaian Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	Mengukur capaian fasilitasi bidang jasa konstruksi	Mengukur capaian tenaga kerja bidang jasa kons
(Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) / rencana pembinaan dan pemberdayaan)x100%	((Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun / Rencana Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) x100%	(Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang SudahDilakukan Pendataan Teknis Pada Tahun N / Jumlah TotalKomplek BGMD Prov. Jawa Tengah) X 100%)	(Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kapasitasnya / Jumlah RencanaJumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kapasitasnya)x100%	((jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang t
BIDANG CIPTA KARYA	**BIDANG CIPTA KARYA**	**BIDANG CIPTA KARYA**		

h Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terlaksanannya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terlaksanannya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terselenggaranya Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan
Jumlah Rumah Tangga di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses air limbah domestik aman Th-N (Rumah Tangga)	**Jumlah TPA/TPST/SPA yang dibangun (Unit)**	**Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun (Unit)**	**Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudahdilakukan pendataan teknis pada tahun n (Lokasi)**	**Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi**	**Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang Tersertifikasi S.D Tahun N**	**Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Caku**
Rumah Tangga	Unit	Unit	Lokasi	Dokumen	Dokumen	Dokumen
Mengukur Jumlah Rumah Tangga di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses air limbah domestik aman Th-N (Rumah Tangga)	Mengukur Jumlah TPA/TPST/SPA yang dibangun (Unit)	Mengukur Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun (Unit)	Mengukur Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudahdilakukan pendataan teknis pada tahun n (Lokasi)	Mengukur Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (Dokumen)	Mengukur jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	Mengukur Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cak
Jumlah Rumah Tangga di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses air limbah domestik aman Th-N (Rumah Tangga)	Jumlah TPA/TPST/SPA yang dibangun (Unit)	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun (Unit)	Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudahdilakukan pendataan teknis pada tahun n (Lokasi)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (Dokumen)	Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi S.D Tahun N	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJA Provinsi

ja Pengembangan Penyehatan Lingkungan		Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan			Pokja Tata Bangunan Dan Perumahan			Pokja Tata Bangunan Dan Perumahan	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	**Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)**	**Pembangunan TPA/TPST/SPA**		**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan**	**Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**		**Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat**	**Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi**							
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan/atau Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Terbangunnya TPA/TPST/SPA	Terbangunnya TPA/TPST/SPA	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	**Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)**	**Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun**	**Jumlah Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun**	**Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun**	**Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat**	**Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya**	**Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan**	**Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih**	**Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi**	**Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan**	**Jumlah pengadaan Buku Konstruksi**	**Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani**	**Jumlah stand pameran yang dilaksanaka n**
Dokumen		**Ton/hari**	**Ton/hari**		**Dokumen**	**Dokumen**	**Orang**	**Lembaga**	**Orang**	**Orang**	**Orang**	**Dokumen**	**Buah**	**Kegiatan**	**Unit**
Mengukur Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	Mengukur Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	Mengukur Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun (Ton/hari)	Mengukur Jumlah Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun (Ton/Hari)	Mengukur Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan (Dokumen)	Mengukur Jumlah Dokumen Pembangunan,Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedunguntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)	Mengukur Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n	Mengukur Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat (Orang)	Mengukur Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Mengukur Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Mengukur Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Mengukur Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Mengukur Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Mengukur Jumlah pengadaan Buku Konstruksi	Mengukur Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani	Mengukur Jumlah stand pameran yang dilaksanaka n
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun (Ton/hari)	Jumlah Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun (Ton/Hari)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pembangunan,Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedunguntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)	Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n (Dokumen)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat (Orang)	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan(Orang)	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan (Dokumen)	Jumlah pengadaan Buku Konstruksi (Buah)	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani (Kegiatan)	Jumlah stand pameran yang dilaksanaka n (Unit)

dek BGMD Prov. Jawa Tengah	
X 100%)	

ROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	
lah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi	
%	
struksi bersertifikat ahli dalam satu tahun terhadap jumlah tenaga kerja bidang jasa konstruksi	
ersertifikasi tahun n/ (JumlahTenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli di Jawa Tengah tahun n) x 100%	

BALAI JASA KONSTRUKSI

	Men
	Indeks RB mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah m

Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko	
Indeks Manajemen Risiko Dinas PUPR	
angka	
Ukuran yang menggambarkan implementasi manajemen risiko di lingkup perangkat daerah	IKM untuk meng
Total (Nilai komponen MR x Bobot)	

Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	
Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	
%	
Mengukur tingkat ketercapaian kinerja utama (Indikator Kinerja Utama/IKU) perangkat daerah	
Rata-rata ((Realisasi IKU PD/Target IKU PD) x 100%)	

Daerah Provinsi	**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**
Daerah Provinsi	Terlaksanannya Kegiatan Pengawasan Bidang Jasa Konstruksi
upan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi
	Dokumen
upan Daerah Provinsi	Mengukur dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi (Dokumen)
KI) Cakupan Daerah	Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi (Dokumen)

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	
Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	**Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan**	**Per**
%	**Dokumen**	**Dokumen**	**%**	
Mengukur proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Akumulasi Jumlah dokumen laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Mengukur hasil pelaksanaan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Mengukur kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan SOP yang berlaku	Mengukur k
(Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan/jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun) x 100%	Total dari seluruh jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dihasilkan dari seluruh sub kegiatan	Total dari seluruh jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dihasilkan dari seluruh sub kegiatan	Rata-rata ((Realisasi Sub Kegiatan/Target Sub Kegiatan) x 100%)	

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	**Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota**	**Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi**	**Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota**
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha
Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	**Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan**	**Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk**	**Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk**	**Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha**
Orang	**Paket Pekerjaan**	**Bangunan Konstruksi**	**Lembaga**	**Badan Usaha**
Mengukur Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Mengukur Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Mengukur Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Mengukur Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Mengukur Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha
Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi danDievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	Badan Usaha

Subbag Program		**Subbag Keuangan**		**Subbag Umpeg**						**Subbag Umpeg dan TU Balai**	**Subbag Umpeg**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan**	**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**
Dokumen	**Laporan**	**Orang/ Bulan**	**Laporan**	**Dokumen**	**Paket**	**Dokumen**	**Orang**	**Orang**	**Orang**	**Paket**	**Paket**	**Paket**
Mengukur semua jenis dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh perangkat daerah	Mengukur semua jenis laporan evaluasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	Mengukur berapa jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam satu tahun	Mengukur hasil penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Mengukur hasil pengamanan barang milik daerah perangkat daerah	Mengukur jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan untuk seluruh ASN dalam satu tahun	Mengukur hasil proses pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian termasuk seluruh kegiatan pelayanan kepegawaian perangkat daerah seperti koordinasi dengan BKN, BKD, pengurusan dokumen kepegawaian, kenaikan pangkat, pensiun, dan lainnya	Mengukur jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Mengukur jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan baik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun yang lain (fasilitasi) yang berkaitan dengan kepegawaian, maupun bukan kepegawaian	Mengukur jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah (terkait dengan tusi) maupun oleh pihak lain (fasilitasi) dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur perangkat daerah	Mengukur penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset dalam satu tahun	Mengukur penyediaan peralatan rumah tangga seperti peralatan kebersihan dan pantry dalam satu tahun	Mengukur penyediaan bahan logistik kantor seperti BBM, obat-obatan, reagen laboratorium, dan lainnya dalam satu tahun
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

ingkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah
Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah
angka
elaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan, yang diukur dari unsur komponen pengungkit (meliputi 8 area perubahan) dan komponen hasil
(Nilai x Bobot Komponen Pengungkit) + (Nilai x Bobot Komponen Hasil)

Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah
Indeks Kepuasan Masyarakat
angka
gukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, yang didapatkan dari survei kepuasan masyarakat
Nilai hasil survei kepuasan masyarakat dari 9 unsur SKM (skala 1-4) yang dikonversi menjadi IKM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
Mengukur rata-rata dari tingkat ketercapaian kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
Rata-Rata ((Realisasi Kegiatan/Target Kegiatan Kegiatan) x 100%)

Sekretariat

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
sentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	**Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun**	**Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan**
%	**unit**	**Laporan**	**unit**
ualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal	Mengukur jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset yang disediakan oleh perangkat daerah	Mengukur hasil dari penyediaan jasa penunjang jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Mengukur jumlah seluruh barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan
Rata-rata ((Realisasi Sub Kegiatan/Target Sub Kegiatan) x 100%)	Jumlah total barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun	Jumlah total laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jumlah total unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan

Subbag Umpeg dan TU Balai				**Subbag Umpeg**					**Subbag Umpeg dan TU Balai**					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Pengadaan Alat Besar**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanaan ya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Alat Besar	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan**	**Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**
Paket	**Dokumen**	**Laporan**	**Laporan**	**Dokumen**	**Unit**	**Unit**	**Unit**	**Laporan**	**Laporan**	**Laporan**	**Laporan**	**Unit**	**Unit**	**Unit**
Mengukur penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk kebutuhan secara umum seluruh kantor seperti kertas kop lembaga, amplop, map, dan lainnya	Mengukur penyediaan bahan bacaan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan kantor baik yang rutin setiap bulan maupun dalam satu tahun seperti penyediaan koran, majalah, tabloid, maupun penyediaan bahan bacaan lainnya untuk perpustakaan kantor	Mengukur layanan fasilitasi kunjungan tamu kelembagaa n seperti akomodasi, transportas i dan lainnya	Mengukur penyediaan layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelembagaan perangkat daerah	Mengukur layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah terutama untuk mengakomodir penyelenggaraan PPID pada perangkat daerah	Memgukur jumlah kendaraan dinas operasional pendukung kegiatan operasional atau lapangan yang disediakan perangkat daerah dalam satu tahun	Mengukur jumlah alat besar yang disediakan perangkat daerah untuk mendukung kegiatan dalam satu tahun seperti bego, eskafator (sesuai kebijakan pemerintah provinsi)	Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pendukung kegiatan perangkat daerah yang disediakan (sesuai kebijakan pemerintah provinsi)	Mengukur penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perangkat daerah seperti biaya sewa peralatan atau perlengkapan kantor	Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya	Mengukur hasil dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah dalam satu tahun	Mengukur penyediaan jasa pelayanan umum kantor seperti penyediaan jasa tenaga outsourcing, jasa kebersihan, dan lainnya	Mengukur jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinanya oleh perangkat daerah dalam satu tahun	Mengukur jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya pada perangkat daerah yang direhabilitasi dalam satu tahun	Mengukur jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan secara rutin seperti pemeliharaan komputer, printer, scanner, dan lainnya
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit alat besar yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Tabel Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		Pemilik Risiko
							Uraian	Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PE)							
1	Sasaran Strategis	Terjaganya Kondisi Jalan Mantap	Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	Kesulitan dalam melaksanakan pelebaran jalan	Risiko operasional	1. Di beberapa daerah masih terdapat jalan yang berada di daerah ekstrem (di pinggir jurang, gunung, bukit dll); 2. Masalah pembebasan lahan.	Jalan Provinsi tidak sesuai dengan standar jalan kolektor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Masyarakat Pengguna jalan	Kepala Dinas
			Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap	Terjadi kerusakan jalan diluar perencanaan	Risiko operasional	1. Terjadi bencana alam dan cuaca ekstrem; 2. Pengguna jalan yang melebihi standar (overload).	Jalan menjadi rusak dan potensi kecelakaan meningkat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Masyarakat Pengguna jalan	Kepala Dinas
			Persentase Panjang Jaian Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	Terjadi kerusakan jalan diluar perencanaan	Risiko operasional	1. Terjadi bencana alam dan cuaca ekstrem; 2. Pengguna jalan yang melebihi standar (overload).	Jalan menjadi rusak dan potensi kecelakaan meningkat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Masyarakat Pengguna jalan	Kepala Dinas
		Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (IKLH)							
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Aman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	Kurangnya minat masyarakat untuk mengakses layanan air minum layak terbangun	Risiko operasional	Adanya alternatif sumber air bersih lain (sumur dangkal)	Gangguan kesehatan masyarakat	Masyarakat, PDAM, Desa/ Kelurahan, Kabupaten/Kota	Kepala Dinas
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Pengolahan air limbah domestik belum optimal	Risiko operasional	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan pengelolaan air limbah domestik yang telah tersedia	Gangguan kesehatan masyarakat	Masyarakat, Desa/ Kelurahan, Kabupaten/Kota	Kepala Dinas
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD)	Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) Dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar	Penyelenggaraan BGMD tidak sesuai standar	Risiko operasional	Kurangnya pemahaman peraturan dan standar teknis bangunan gedung	Keselamatan konstruksi	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya; Pengguna Gedung	Kepala Dinas
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengelolaan SDA	Persentase Penyediaan Rencana Teknis terhadap Rencana Pembangunan Infrastruktur SDA	Tidak tersedianya Rencana Teknis terhadap kebutuhan Rencana Pembangunan Infrastruktur SDA	Risiko Strategis	Kurangnya penyediaan dokumen perencanaan teknis	Tidak tercapainya rencana pembangunan Infrastruktur SDA	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	Kepala Dinas
			Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Menurunnya kinerja sistem irigasi	Risiko Strategis	Kerusakan sarpras jaringan irigasi, kurang efektifnya manajemen alokasi air, terbatasnya kapasitas SDM dan kelembagaan	Produktivitas pertanian menurun	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	Kepala Dinas
			Persentase Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air	Menurunnya Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air	Risiko Strategis	- Kerusakan sarpras sungai, terbatasnya bangunan pengendali banjir, rendahnya kepedulian masyarakat - Kurangnya jumlah sarpras air baku	- Meningkatnya ancaman bencana banjir/rob - Tidak terpenuhinya kebutuhan air baku	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	Kepala Dinas
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Persentase Tertib Ruang	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Risiko Strategis	Belum optimalnya aspek pengaturan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penataan ruang	Terganggunya aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Masyarakat	Kepala Dinas

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		Pemilik Risiko
							Uraian	Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase ketersediaan rencana tata ruang	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Risiko Strategis	Terbatasnya Ketersediaan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai acuan pembangunan	Terganggunya aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Masyarakat	Kepala Dinas
			Persentase implementasi pemanfaaatan ruang	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Risiko Strategis	Kurangnya pemahaman SDM pemerintah daerah dibidang penataan ruang	Terganggunya aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Masyarakat	Kepala Dinas

Tabel Analisis Risiko

NO	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kesulitan dalam melaksanakan pelebaran jalan	3	3	9	Ada	Optimalisasi pelebaran ruas jalan sesuai ketersediaan tanah pada bahu jalan/ rumija	Memadai	2	2	4
2	Terjadi kerusakan jalan diluar perencanaan	2	3	6	Ada	Pemeliharaan rutin jalan dengan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC)	Memadai	2	3	6
3	Terjadi kerusakan jalan diluar perencanaan	2	3	6	Ada	Pemeliharaan rutin jalan dengan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC)	Memadai	2	3	6
4	Kurangnya minat masyarakat untuk mengakses layanan air minum layak terbangun	3	3	9	Ada	Pembinaan dan monev	Memadai	2	2	4
5	Pengolahan air limbah domestik belum optimal	3	3	9	Ada	Bimbingan teknis (bintek) dan monev	Memadai	2	2	4
6	Penyelenggaraan BGMD tidak sesuai standar	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan bantuan teknis (monev)	Memadai	2	2	4
7	Tidak tersedianya Rencana Teknis terhadap kebutuhan Rencana Pembangunan Infrastruktur SDA	3	4	12	Ada	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis	Memadai	2	3	6
8	Menurunnya kinerja sistem irigasi	3	4	12	Ada	Rehabilitasi dan pemeliharaan sarpras jaringan irigasi, Rakor alokasi air, Pembinaan SDM dan kelembagaan	Memadai	2	3	6
9	Menurunnya Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air	3	4	12	Ada	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarpras sungai dan penampungan air	Memadai	2	3	6

NO	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	3	4	12	Ada	Mengoptimalkan koordinasi antar sektor dalam perencanaan pemanfaatan ruang sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan	Memadai	2	3	6
11	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	3	4	12	Ada	Mendorong kementerian/ lembaga untuk mensingkronkan kebijakan dengan memperhatikan kondisi aktual wilayah kabupaten/kota agar kebijakan dapat diimplementasikan	Memadai	2	3	6
12	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah	3	4	12	Ada	Penguatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, bimtek, seminar, dan workshop	Memadai	2	3	6

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Instruksi ini mengamanatkan agar Gubernur memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, serta menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik.

Penyusunan Renstra dilakukan dengan pendekatan yang transparan, partisipatif, efektif, efisien, terukur, akuntabel, serta berorientasi pada hasil (outcome-oriented). Renstra ini juga mempertimbangkan unsur inovasi, kreativitas, dan pendekatan berbasis risiko (*risk-based planning*) agar mampu menjawab tantangan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah secara optimal.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk periode 2025-2029 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sehingga selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, utamanya dalam sektor perumahan dan permukiman, serta sektor pertanahan. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dilakukan mendasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, beberapa regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang menjadi perhatian antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini berfungsi untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua kegiatan baik

yang sedang berlangsung maupun yang akan datang, serta dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi risiko serta mengoptimalkan pencapaian hasil pembangunan. Selain itu, Renstra juga menjadi alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kemajuan pelaksanaan tugas yang telah direncanakan.

Untuk memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan Asta Cita Presiden RI 2025-2029 dalam misi ke-3 yaitu "meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur", serta misi ke-6 yaitu "membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan". Selain itu, Renstra ini juga mendukung pencapaian visi misi daerah Provinsi Jawa Tengah, utamanya pada misi ke-4 yaitu "mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan melalui perencanaan tata ruang yang responsif", dimana misi tersebut difokuskan untuk menciptakan keterpenuhan infrastruktur dan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, nyaman, dan berkelanjutan, serta memperhatikan konektivitas wilayah.

Dalam Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 berkaitan erat dengan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. Namun, tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban SPM, tetapi juga diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman, antara lain penanganan rumah tidak layak huni untuk mengurangi jumlah *backlog* kelayakan melalui peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat miskin, penyediaan rumah untuk mengurangi jumlah *backlog* kepemilikan perumahan melalui pembangunan baru bagi masyarakat miskin, peningkatan kualitas permukiman kumuh, serta kolaborasi lintas sektor dan kemitraan dengan swasta untuk mendukung penyediaan perumahan.

Seluruh kebijakan dan program dalam urusan ini juga diarahkan untuk responsif terhadap kebutuhan gender dan kelompok rentan, mengingat bahwa perempuan, terutama kepala keluarga perempuan, penyintas bencana, dan penyandang disabilitas, seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap perumahan yang layak dan aman. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik tempat tinggal, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, serta partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Integrasi perspektif gender menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan hunian yang inklusif, berkeadilan, dan mendukung kualitas hidup seluruh penghuni.

Selain membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa

Tengah juga membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang berkontribusi langsung dalam mendukung kelancaran pembangunan, khususnya dalam aspek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta pelaksanaan reforma agraria. Penyelenggaraan urusan ini diarahkan untuk mendukung kepastian hukum pertanahan, mendukung pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman, serta memperkuat tata kelola pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dibuat setiap tahun dalam periode lima tahun. Selain itu, Renstra ini juga menjadi acuan utama dalam proses pengendalian dan evaluasi pembangunan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi tersebut mencakup peninjauan terhadap pencapaian target dalam Renstra maupun evaluasi terhadap pelaksanaan Renja, guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
24. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
25. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
26. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
42. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 600/21 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
43. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/39 Tahun 2024 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah;
44. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 0007/0001565 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen teknis pelaksanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Tujuan dari disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah :

a. Sebagai Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
c. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun serta capaian kinerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini paling sedikit memuat tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026, dan mengulas hambatan hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan perangkat daerah merupakan penyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Sedangkan Sasaran merupakan kondisi hasil yang diharapkan agar tujuan dapat tercapai, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selain penjabaran dan penjelasan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, dalam subbab ini juga dijelaskan sub kegiatan yang mendukung program-program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, regulasi ini disusun sebagai tindak lanjut dari Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Perangkat Daerah berperan sebagai unsur pendukung kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah memiliki peran dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dikelola melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM). Urusan tersebut mencakup bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Selain menangani urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah juga bertanggung jawab atas urusan wajib yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sebagai Tipe A. Dinas ini bertugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan, dengan kedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi dinas akan dijabarkan lebih lanjut dalam masing-masing bidang atau urusan yang ada di dalamnya, sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

2.1.1 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi :

a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

2.1.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perumahan;
d. Bidang Kawasan Permukiman;
e. Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f. Bidang Pertanahan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas merupakan posisi tertinggi dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari dinas terkait. Berikut merupakan gambaran bagan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah :

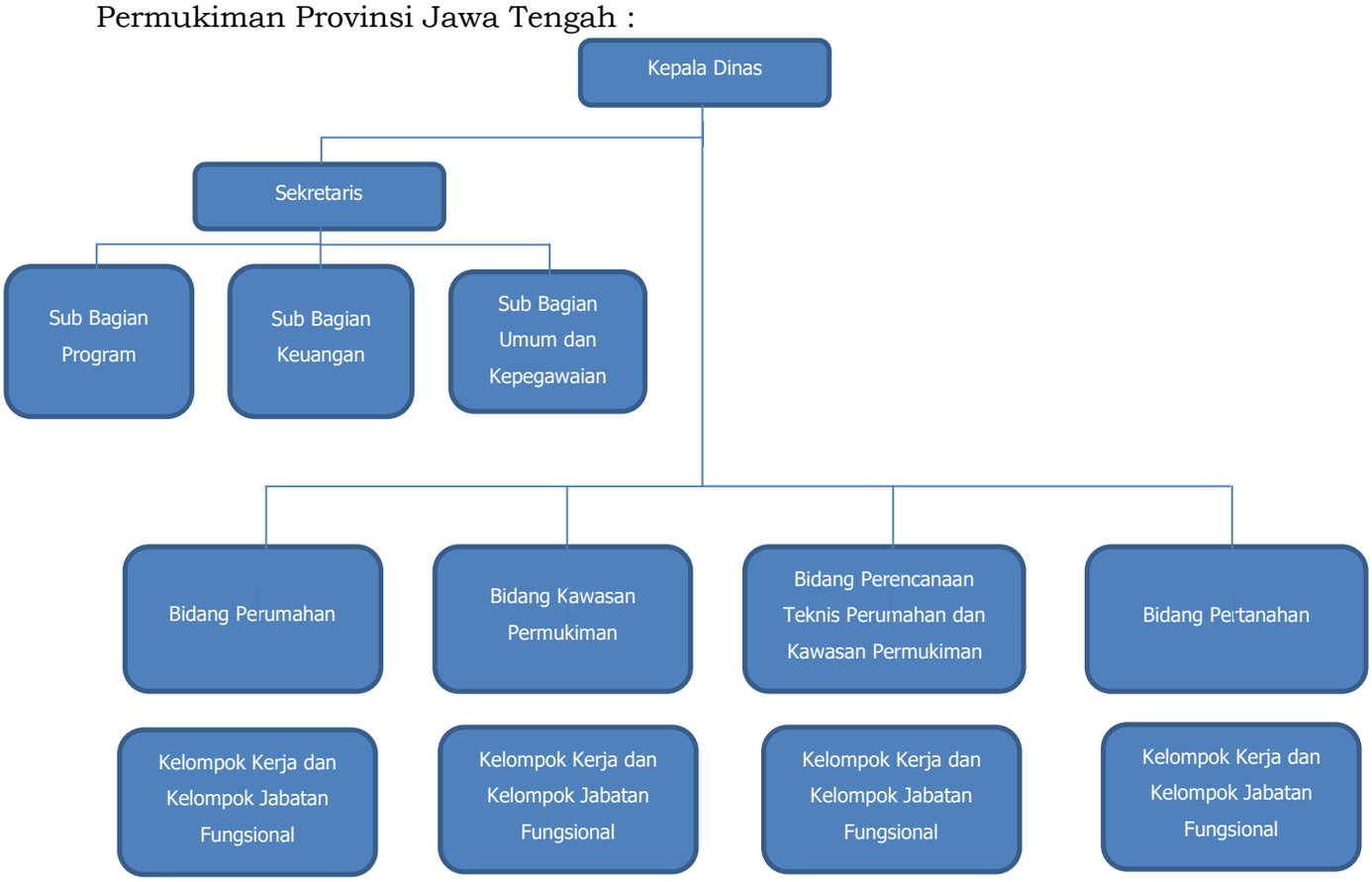

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Gambar 2.1. uraian susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**;
2. **Sekretariat,** membawahkan**:**
   a. Subbagian Program;
   b. Subbagian Keuangan;
   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. **Bidang Perumahan,** membawahkan Kelompok Kerja;
4. **Bidang Kawasan Permukiman,** membawahkan Kelompok Kerja;
5. **Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman,** membawahkan Kelompok Kerja;
6. **Bidang Pertanahan,** membawahkan Kelompok Kerja;
7. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

2.1.3 Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang dalam Tata Kerja Dinas

Dalam struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, memiliki peran dan fungsi spesifik yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinas secara menyeluruh. Pembagian tugas ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga tujuan serta sasaran pembangunan dapat tercapai dengan lebih optimal.

Dalam menjalankan tugasnya, DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas, yang bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan dan program kerja dinas. Kepala Dinas didukung oleh Sekretaris, beberapa Kepala Bidang yang mengelola urusan teknis sesuai bidangnya yang berperan dalam pelaksanaan teknis operasional di lapangan.

Tabel berikut menyajikan rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang dalam satuan kerja DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1.
Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
1	**Sekretariat**	Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas	a.	pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas
			b.	pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas
			c.	pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas
			d.	pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
			e.	pengelolaan informasi dan dokumentasi

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
			f.	pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas
			g.	penyelenggaraan sistem pengendalian internal perangkat daerah
			h.	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas
			i.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
2.	**Bidang Perumahan**	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan	a.	perumusan kebijakan terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat penanganan Backlog
			b.	pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat penanganan Backlog
			c.	pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat penanganan Backlog
			d.	monitoring dan evaluasi terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat penanganan Backlog
			e.	pelaporan dan rekomendasi terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pembiayaan perumahan, dan penyediaan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat penanganan Backlog
			f.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
3	**Bidang Kawasan Permukiman**	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman	a.	perumusan kebijakan terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
			b.	pelaksanaan kebijakan terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
			c.	pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
			d.	monitoring dan evaluasi terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
			e.	pelaporan dan rekomendasi terkait penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman
			f.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4	**Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman**	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman	a.	perumusan kebijakan terkait sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data
			b.	pelaksanaan kebijakan terkait sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data
			c.	pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
			d.	pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data
			e.	pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemitraan, pendayagunaan implementasi rekayasa teknologi, perencanaan sektoral perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan basis data
			f.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
5.	**Bidang Pertanahan**	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan	a.	perumusan kebijakan terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria
			b.	pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria
			c.	pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
				berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria
			d.	monitoring dan evaluasi terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria
			e.	pelaporan dan rekomendasi terkait perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyiapan data penyediaan lahan pembangunan kepentingan umum untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pembangunan nasional, penyelesaian sengketa tanah dan perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan reforma agraria
			f.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

***Sumber** : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025*

Tabel 2.2.
Tugas dan Fungsi Tiap Sub Bagian

No	Struktur	Sub Bagian/ Seksi/ Sub Koord	Tugas	
1	**Sekretariat**	Subbagian Program	a.	menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program
			b.	menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program
			c.	menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program
			d.	menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas

No	Struktur	Sub Bagian/ Seksi/ Sub Koord	Tugas	
			e.	menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas
			f.	menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program
			g.	menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program
			h.	melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
		Subbagian Keuangan	a.	menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Keuangan;
			b.	menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan
			c.	menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan
			d.	menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
			e.	menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan
			f.	menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi
			g.	menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan
			h.	menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan
			i.	melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
		Subbagian Umum dan Kepegawaian	a.	menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian
			b.	menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
			c.	menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
			d.	menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas
			e.	menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas
			f.	menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas
			g.	menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas
			h.	menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas
			i.	menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas
			j.	menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian
			k.	menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian
			l.	melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

***Sumber** : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025*

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Pegawai

Jumlah pegawai DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah sejumlah 80 orang, terdiri dari 45 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 35 orang pegawai berjenis kelamin perempuan. Jumlah pegawai apabila dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai	Tingkat Pendidikan						
	Dasar	Menengah		Tinggi			
	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2
Jumlah Pegawai	0	0	12	3	2	43	20
	0	12		68			
TOTAL	**80**						

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Status Akhir Desember Tahun 2024)

Sedangkan, jika digolongkan berdasarkan golongan ruang, pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai				Jumlah
	Laki-Laki		Perempuan		
IV	9	20%	3	9%	12
III	24	53%	28	80%	52
IX	6	13%	2	6%	8
II	6	13%	1	3%	7
VII	0	0%	1	3%	1
I	0	0%	0	0%	0
TOTAL					**80**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Status Akhir Desember Tahun 2024

Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan data pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 diatas, lebih banyak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sesuai dengan kualifikasi pada pekerjaan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kebutuhan tenaga pendukung (tingkat pendidikan menengah) sudah memenuhi menurut jumlah dan kualifikasi sehingga diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan.

2.2.2 Bangunan Gedung

Jumlah Bangunan Gedung yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ada 8 bangunan gedung yang memiliki kondisi baik yang berada di Jl.Madukoro Blok AA-BB, Kelurahan

Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Rincian bangunan gedung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NO	JENIS BARANG	KONDISI BANGUNAN	LOKASI	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung, Bangunan gedung kantor permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	BANGUNAN UTAMA DISPERAKIM
2	Bangunan Gedung, Bangunan gedung kantor permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	TIDAK DIGUNAKAN
3	Bangunan Gedung, Bangunan Tempat ibadah	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	
4	Bangunan Gedung, Gedung pos jaga permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	
5	Bangunan Gedung, Bangunan gedung kantor permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	
6	Bangunan Gedung.bangunan gedung kantor permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	
7	Bangunan Gedung. bangunan gedung kantor permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	
8	Bangunan Gedung. bangunan gedung kantor permanen	BAIK	JL. MADUKORO BLOK AA-BB, TAWANGMAS, SEMARANG BARAT	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Status Akhir Desember Tahun 2024

2.2.3 Kendaraan Dinas

Jumlah mobil dinas yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Bagunan Gedung Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ada 14 mobil dinas dan 7 motor dinas yang memiliki kondisi baik. Rincian mobil dinas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Mobil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Barang	Tahun Pembelian	Keterangan				
			Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Ket
1	Toyota Innova Zenix	2023	MHFABAAA2P 000238 8	MHBF3CG3CG J00273 7	H 1194 XR	-	
2	Nissan X-Trail	2016	MHBF3CG3CGJ 00273 7	MR20836833 B	H 40	M06538348	
3	Toyota Avanza	2014	MHKM1CA3JE K01862 5	DEJ9214	H 1833 XR	L02397742	
4	Toyota Innova	2014	MHFXW42G3E 228817 4	1TR7792872	H 1834 XR	L-02397847	
5	Toyota Avanza Veloz	2013	MHKM1CA4JD K04794 9	DDV1249	H 1323 XW	K-06520346	

No	Jenis Barang	Tahun Pembelian	Keterangan				
			Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Ket
6	Toyota Innova	2010	MHFXW43G4A 405488 21	TR7051188	H 1106 XW	H-07357501I	
7	Toyota Innova	2010	MHFXW43G3A 405396 5	1TR7029710	H 1160 XW	H-06905498I	
8	Toyota Innova	2010	MHFXW43G0A 405482 91	TR7049767	H 1163 XW	H-06905499I	
9	Toyota Innova	2010	MHFXW43G8A 405491 7	1TR7045905	H 1099 XW	H069054971	
10	Nissan X-Trail	2010	MHBF2CG3AAJ 00409 0	MR20008482 R	H 1107 XW	H-07357661I	
11	Toyota Innova	2010	MHFXW43G5A 405481 2	1TR7048992	H 1162 XW	H-06905500I	
12	Toyota Innova	2009	MHFXW42G39 2149211	TR6839048	H 1640 XG	G-0809528I	
13	Honda CR-V	2009	MHRRE17409J 901731	R20A138142 88	H 1374 XG	G0476996I	
14	Honda Civic	2001	MHRS5AMPF1 L00106 7	F171402207	H 1375 XG	C-0490555I	
15	Honda Revo	2014	MH1KC4114E K34225 0	KC41E13408 89	H 6621 XZ	L09225787	
16	Honda Revo	2014	MH1KC4119E K34560 0	KC41E13439 50	H 6624 XZ	L09225786	
17	Honda	2010	MH1JBC115AK 98179 0	JBC1E197765 4	H 6097 XW	H-06904749	
18	Honda	2010	MH1JF8118AK 089809	JF81E109250 3	H 6101 XW	H-06904745	
19	Honda	2010	MH1JF8112AK 087179	JB81E108985 0	H 6105 XW	H-06904744	
20	Honda	2010	MH1JF811XAK 101037	JB81E110373 2	H 6098 VW	H-06904743	
21	Suzuki	2009	MH8BE4DFA9J 74994 9	E451ID78593 8	H 6264 XW	G-1013456I	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Status Akhir Desember Tahun 2024

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Tugas pokok dan fungsi DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan. Fokus utamanya mencakup penanganan *backlog* kelayakan melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, penanganan *backlog* kepemilikan melalui pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, penanganan kawasan permukiman kumuh, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman. Selain itu, DISPERAKIM juga berperan dalam pembinaan kabupaten/ kota untuk mendukung program perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), DISPERAKIM berkaitan erat dengan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

DISPERAKIM telah berhasil menyalurkan bantuan untuk mengentaskan *backlog* kelayakan dan *backlog* kepemilikan bagi puluhan ribu rumah tangga miskin dan menangani kawasan permukiman kumuh di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, seperti dinamika data pertumbuhan *backlog* kelayakan dan *backlog* kepemilikan, serta data pertumbuhan kawasan kumuh, dinamika kebijakan terkait perumahan dan kawasan permukiman, keterbatasan lahan, kurangnya data spasial yang akurat, adanya dampak perubahan iklim dan bencana alam, kelembagaan, serta permasalahan sosial di masyarakat.

Tingkat pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sasaran atau target yang ditetapkan dalam Renstra hingga Tahun 2024 dijabarkan pada penjelasan dibawah ini.

a) Perumahan

Berdasarkan dokumen RPD-Renstra Tahun 2024-2026, untuk indikator sasaran pertama, yakni ***persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat*** dapat memenuhi target. Pada Tahun 2024 dicatatkan realisasi sebesar 31,76% dari target 29,69% dimana tingkat ketercapaian untuk indikator ini mencapai 106,97%. Capaian tersebut diperhitungkan berdasarkan dari hasil intervensi penanganan *backlog* kelayakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta/ BUMN/ BUMD dan peran masyarakat/ *stakeholders* terkait lainnya. Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, masih terdapat **1.582.024 unit** *backlog* kelayakan di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi *baseline* data RPJMD Periode 2018-2023. Namun, disamping daripada intervensi yang dilakukan, terjadi pertumbuhan jumah *backlog* kelayakan berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang hingga pada Tahun 2024 pertumbuhan tersebut mencapai **1.051.190 unit**.

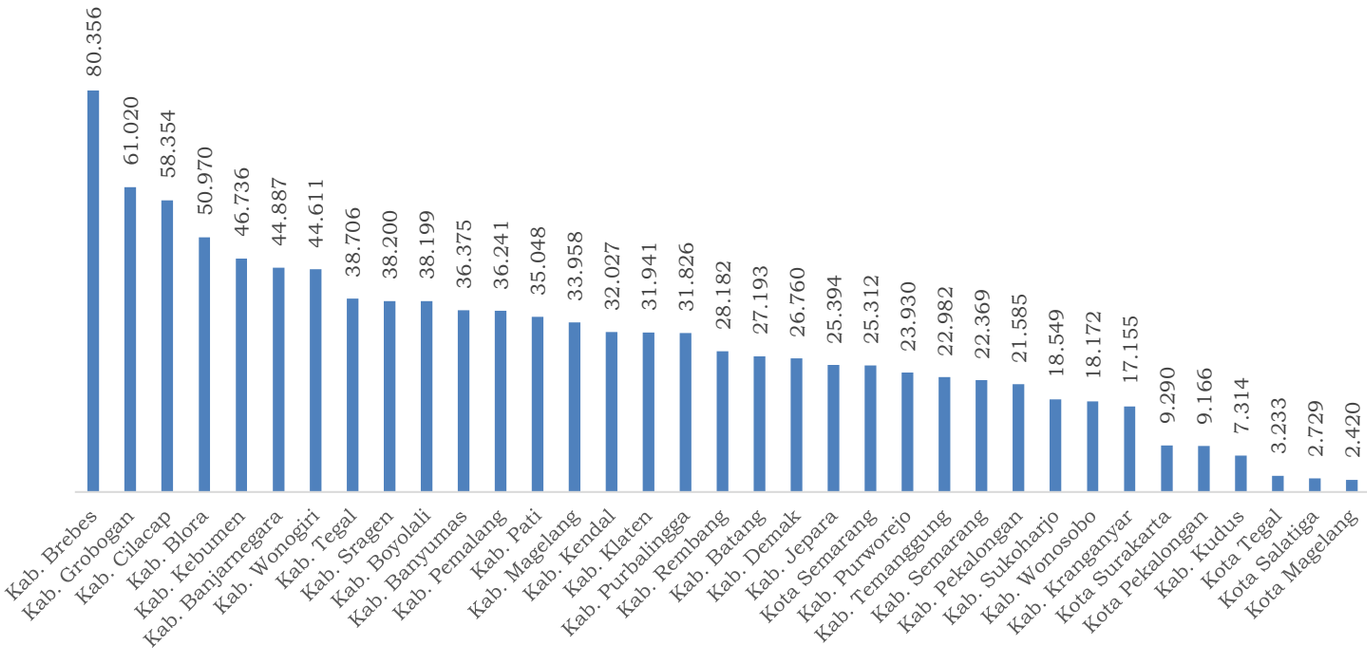

***Sumber**: Updating Data dan Rekom dengan SIMPERUM, diolah 2024*

Gambar 2.2.
Pertumbuhan *Backlog* Kelayakan di Provinsi Jawa Tengah s.d. Tahun 2024

Penanganan RTLH secara umum mengintervensi 3 data, yaitu pada PBDT 2015, DTKS, dan Non DTKS. Total penanganan RTLH dari berbagai sumber anggaran, swadaya masyarakat, dan verivali lapangan telah dilaksanakan hingga pada Tahun 2024 mencapai **1.800.531 unit**, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.7.
Penanganan *Backlog* Kelayakan dari Berbagai Sumber Anggaran dan Swadaya Masyarakat/ Verivali Lapangan s.d. Desember Tahun 2024

NO	Sumber Anggaran	Interv Awal	s.d. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
I.	**APBN**		**32.711**	**50.323**	**48.809**	**32.623**	**35.771**	**26.542**	**18.995**	**245.774**
II.	**APBD PROVINSI**		**52.690**	**23.208**	**10.298**	**11.293**	**11.487**	**16.592**	**17.535**	**143.103**
	- Bankeupemdes	--	52.690	23.058	10.182	11.152	11.417	16.125	17.325	141.949
	- PK Bencana	--	--	--	--	118	51	345	175	689
	- PB Bencana	--	--	150	116	23	19	122	35	465
III.	**APBD KAB. / KOTA**		**13.270**	**26.651**	**12.855**	**11.370**	**12.714**	**12.229**	**10.135**	**99.224**
IV.	**CSR**		**36.894**	**2.388**	**3.268**	**1.593**	**2.659**	**2.610**	**2.517**	**51.929**
V.	**SWADAYA MASYARAKAT/ VERIVALI**	**100.699**	**305.286**	**276.524**	**54.693**	**63.735**	**84.780**	**372.771**	**2.013**	**1.260.501**
JUMLAH		**100.699**	**440.851**	**379.094**	**129.923**	**120.614**	**147.411**	**430.744**	**51.195**	**1.800.531**
KUMULATIF			**541.550**	**920.644**	**1.050.567**	**1.171.181**	**1.318.592**	**1.749.336**	**1.800.531**	

***Sumber** : Berbagai Sumber Pembiayaan pada Intervensi Stimulant RTLH, diolah, 2024*

Secara ringkas, pergerakan data RTLH, baik intervensi maupun pertumbuhan RTLH baru dapat dijabarkan dalam skema berikut :

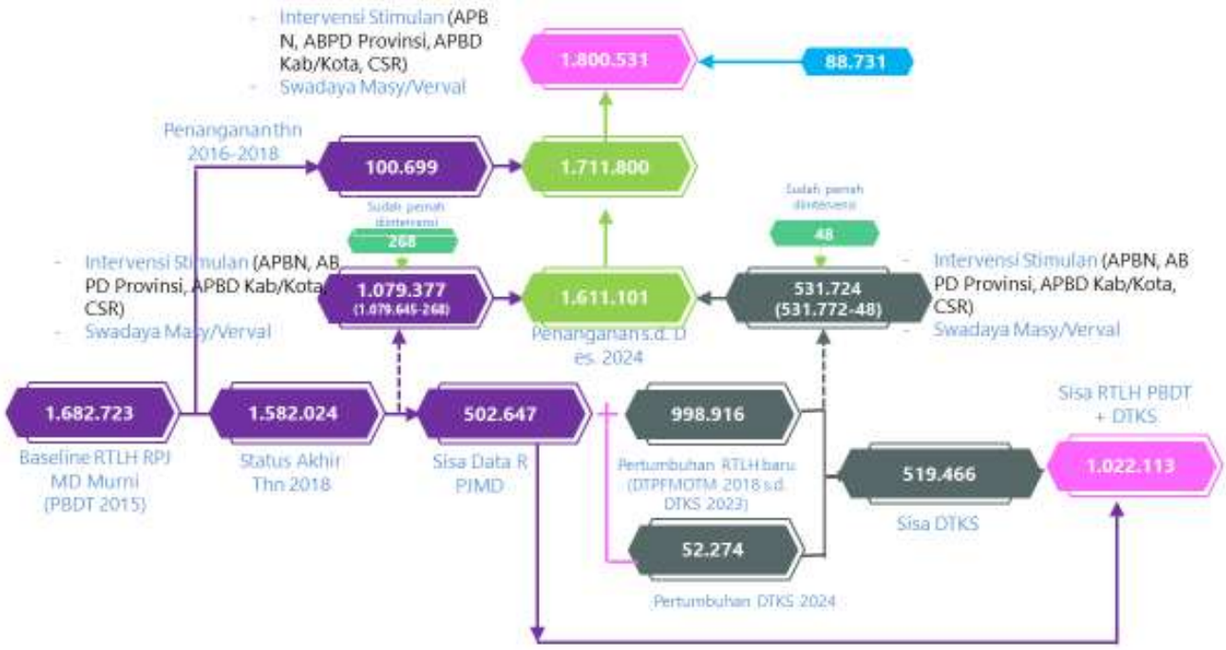

***Sumber**: Updating Data dan Rekom dengan SIMPERUM, diolah 2024*

Gambar 2.3.
Skema Penanganan *Backlog* Kelayakan s.d. 2024
pada PBDT 2015; DTKS s.d. 2024; dan Non DTKS

Dari skema diatas, dapat diketahui bahwa berdasarkan dari data *backlog* kelayakan di Provinsi Jawa Tengah beserta penanganan yang telah dilaksanakan s.d. Tahun 2024, masih terdapat sisa *backlog* kelayakan yaitu sebanyak **1.022.113 unit** yang terdiri atas **502.647 unit** dari sisa data PBDT-2015 dan **519.466 unit** sisa dari data DTKS.

Tabel 2.8.
Sisa *Backlog* Kelayakan per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	PBDT	DTKS	Total
1	Kab. Banjarnegara	11.098	21.250	32.348
2	Kab. Banyumas	30.823	19.747	50.570
3	Kab. Batang	14.338	13.810	28.148
4	Kab. Blora	43.330	39.373	82.703
5	Kab. Boyolali	14.815	21.806	36.621
6	Kab. Brebes	18.296	34.831	53.127
7	Kab. Cilacap	33.563	37.395	70.958
8	Kab. Demak	32.971	16.918	49.889
9	Kab. Grobogan	60.517	45.611	106.128
10	Kab. Jepara	22.044	9.931	31.975
11	Kab. Karanganyar	2.794	8.673	11.467
12	Kab. Kebumen	11.587	12.766	24.353
13	Kab. Kendal	18.199	15.599	33.798
14	Kab. Klaten	5.262	13.698	18.960
15	Kab. Kudus	518	1.547	2.065
16	Kab. Magelang	16.111	14.158	30.269
17	Kab. Pati	37.268	17.956	55.224
18	Kab. Pekalongan	5.527	10.108	15.635
19	Kab. Pemalang	19.730	17.677	37.407

No	Kabupaten/ Kota	PBDT	DTKS	Total
20	Kab. Purbalingga	11.544	16.337	27.881
21	Kab. Purworejo	5.718	9.841	15.559
22	Kab. Rembang	19.322	17.261	36.583
23	Kab. Semarang	10.690	9.462	20.152
24	Kab. Sragen	14.589	18.425	33.014
25	Kab. Sukoharjo	4.597	5.676	10.273
26	Kab. Tegal	10.551	16.183	26.734
27	Kab. Temanggung	10.596	11.962	22.558
28	Kab. Wonogiri	5.423	10.582	16.005
29	Kab. Wonosobo	9.741	7.998	17.739
30	Kota Magelang	64	745	809
31	Kota Pekalongan	400	3.718	4.118
32	Kota Salatiga	312	708	1.020
33	Kota Semarang	-	13.304	13.304
34	Kota Surakarta	217	4.049	4.266
35	Kota Tegal	92	361	453
Jumlah		**502.647**	**519.466**	**1.022.113**

***Sumber**: Updating DATA & Rekom dengan SIMPERUM, diolah 2024*

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, program pengembangan perumahan menjadi program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian program prioritas Gubernur "Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 Rumah Layak Huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional" serta mendukung pencapaian program aksi Gubernur "Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir" dan program taktis Gubernur "Fasilitasi Rumah Susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan Swasta".

Selain itu, sebagai wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem, penanganan sisa *backlog* kelayakan tersebut direncanakan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka panjang, yakni selama 20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Strategi ini disusun dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan lintas tingkat pemerintahan serta sektor swasta dan masyarakat.

Melalui skema ini, Gubernur mendelegasikan sebagian tanggung jawab pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan tetap memberikan fasilitasi, arah kebijakan serta dukungan teknis. Model *collaborative funding* ini diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya fiskal yang tersedia, mencegah terjadinya tumpang tindih program, serta mempercepat penanganan *backlog* kelayakan secara lebih adil dan merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. Proporsi penanganan *backlog* kelayakan ini akan dibagi secara sebagai berikut :

- 20% akan ditangani oleh Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta sektor *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari dunia usaha. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif dari sektor filantropi dan swasta dalam mendukung pembangunan sosial.
- 30% ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai bentuk komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, serta mempercepat pengurangan *backlog* perumahan.

- 30% menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diharapkan dapat lebih responsif dalam menyasar rumah-rumah tidak layak huni di wilayah administratif masing-masing, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
- 20% sisanya akan ditangani oleh Pemerintah Desa, melalui pemanfaatan Dana Desa dan program-program pemberdayaan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan partisipasi warga.

Melalui pendekatan berbasis kolaborasi dan proporsi penanganan yang seimbang ini, diharapkan permasalahan *backlog* kelayakan di Jawa Tengah dapat diselesaikan secara tuntas dan berkeadilan dalam kurun waktu dua dekade ke depan. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh alokasi anggaran, tetapi juga sangat bergantung pada penguatan data yang akurat, perencanaan yang matang, partisipasi aktif masyarakat, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.

Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Provinsi Jawa Tengah optimis dapat mewujudkan hunian layak bagi seluruh warganya sebagai bagian dari upaya nyata menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*), khususnya pada tujuan ke-11 : Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.

Tabel 2.9.
Skenario Penanganan *Backlog* Kelayakan 2026-2030

No	Target Penanganan per Tahun	Sat.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pemerintah Pusat dan	Unit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	Baznas/ CSR	Unit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Pemerintah Provinsi	Unit	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Unit	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	Pemerintah Desa	Unit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Partisipasi Masyarakat	Unit						
Total per Tahun		**Unit**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
Total 2026-2030		**Unit**	**303.000**					

Sedangkan, untuk indikator sasaran ke-2, yakni ***persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat*** juga dapat memenuhi target dengan realisasi 20,33% dari target 20,14% sehingga tingkat ketercapaiannya mencapai 100,94%. Capaian tersebut diperhitungkan berdasarkan dari penyediaan rumah layak huni baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta/ BUMN/ BUMD dan peran masyarakat/ *stakeholders* terkait lainnya, yang secara rinci dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10.
Penyediaan Rumah Layak Huni dari Berbagai Sumber Anggaran dan Swadaya Masyarakat/ Verivali Lapangan
s.d. Desember Tahun 2024

SUMBER	JUMLAH UNIT RUMAH/ PEMBANGUNAN BARU (unit)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
APBN	**1.279**	**25**	**220**	**2.201**	**221**	**629**	**4.575**
- Satker Strategis PP	1.073	25	--	4	--	--	1.102
- SNVT PnP Jateng	206	--	220	--	88	192	706
- PB DAK	--	--	--	2.197	103	437	2.737
- Dana Desa	--	--	--	--	16	--	16
- Kemensos	--	--	--	--	14	--	14
APBD PROVINSI	**--**	**200**	**186**	**326**	**900**	**581**	**2.193**
- PB Backlog	--	200	186	253	615	328	1.582
- PB Relokasi	--	--	--	73	285	253	611
APBD KABUPATEN/ KOTA	**--**	**--**	**--**	**143**	**151**	**107**	**401**
- PB Backlog	--	--	--	143	63	71	277
- PB Relokasi	--	--	--	--	88	36	124
ASOSIASI PERUMAHAN	**11.483**	**30.193**	**30.595**	**24.709**	**57.364**	**52.986**	**207.330**
CSR/ LAINNYA	--	--	**5.799**	**224**	**3.858**	**818**	**10.699**
- Swadaya Masyarakat, pada permintaan IMB dari DPMPTSP Kab/Kota	--	--	5.799	--	3.830	754	10.383
- CSR	--	--	--	224	28	64	316
JUMLAH	**12.762**	**30.418**	**36.800**	**27.603**	**62.494**	**55.121**	**225.198**
KUMULATIF	**12.762**	**43.180**	**79.980**	**107.583**	**170.077**	**225.198**	

***Sumber** : Berbagai sumber pembiayaan pada realisasi pembangunan rumah baru, diolah, 2024*

Sebaran *backlog* kepemilikan status Desember 2024 sebagaimana Tabel 3.5 dibawah ini. Berdasarkan data Simperum pada akhir 2024, di Provinsi Jawa Tengah masih terdapat 324.803 jiwa yang belum memiliki rumah.

Tabel 2.11.
Sebaran *Backlog* Kepemilikan di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah status Desember Tahun 2024

NO	Kabupaten/ Kota	Backlog Miskin
1	Kabupaten Banjarnegara	5.574
2	Kabupaten Banyumas	11.363
3	Kabupaten Batang	4.399
4	Kabupaten Blora	4.601
5	Kabupaten Boyolali	6.565
6	Kabupaten Brebes	22.406
7	Kabupaten Cilacap	12.349
8	Kabupaten Demak	8.623
9	Kabupaten Grobogan	8.512
10	Kabupaten Jepara	10.319
11	Kabupaten Karanganyar	5.726
12	Kabupaten Kebumen	12.503
13	Kabupaten Kendal	10.620
14	Kabupaten Klaten	21.539
15	Kabupaten Kudus	3.210
16	Kabupaten Magelang	7.907
17	Kabupaten Pati	9.292
18	Kabupaten Pekalongan	10.097
19	Kabupaten Pemalang	13.144

NO	Kabupaten/ Kota	Backlog Miskin
20	Kabupaten Purbalingga	6.188
21	Kabupaten Purworejo	12.044
22	Kabupaten Rembang	3.783
23	Kabupaten Semarang	4.442
24	Kabupaten Sragen	5.631
25	Kabupaten Sukoharjo	11.974
26	Kabupaten Tegal	22.095
27	Kabupaten Temanggung	4.990
28	Kabupaten Wonogiri	2.657
29	Kabupaten Wonosobo	4.933
30	Kota Magelang	3.364
31	Kota Pekalongan	7.093
32	Kota Salatiga	1.896
33	Kota Semarang	21.119
34	Kota Surakarta	16.990
35	Kota Tegal	6.855
	JUMLAH	**324.803**

Sumber : *Simperum, 2024*

Selain itu, kebutuhan rumah layak huni juga dapat disebabkan karena adanya faktor geografi yaitu bencana alam. Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang pada Tahun 2022 jumlah rumah tidak layak huni dari 2.440 jumlah kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah terdapat 611 unit rumah rusak berat, 869 unit rumah rusak sedang, dan 4.616 unit rumah rusak ringan.

b) Kawasan Permukiman

Berdasarkan dokumen RPD-Renstra Tahun 2024-2026, untuk indikator sasaran ketiga, yakni ***persentase penurunan kawasan kumuh*** telah memenuhi target, berdasarkan hasil intervensi penanganan kawasan permukiman kumuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan masing – masing. Penanganan kawasan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi kawasan permukiman kumuh dan penetapan kawasan permukiman kumuh melalui Surat Keputusan Walikota/Bupati. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu dibawah 10 Ha, antara 10-15 Ha dan di atas 15 Ha. Luasan kumuh dibawah 10 ha menjadi kewenangan kabupaten/ kota, luasan kumuh 10-15 Ha merupakan kewenangan Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 Ha merupakan kewenangan Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang mempunyai luas 10-15 Ha.

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DISPERAKIM melakukan identifikasi dan menetapkan kawasan permukiman kumuh seluas **3.004,59 Ha** dengan kumuh 10-15 Ha seluas **474,66 Ha**. Penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati/ Walikota sampai dengan Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah menyisakan luasan kawasan kumuh sebesar **571,10 Ha** sedangkan untuk sisa luasan kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi (10 – 15 Ha) adalah sebesar **152,85 Ha**. Namun, terjadi penambahan kawasan permukiman kumuh sampai dengan Tahun 2022 menjadi **10.671,84 Ha**. Beberapa penanganan telah dilakukan untuk menangani kawasan permukiman

kumuh, hingga pada akhir Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah sisa kawasan permukiman kumuh total di Provinsi Jawa Tengah sebesar **6.094,91 Ha**, dan untuk sisa luasan kawasan kumuh kewenangan Provinsi (10 – 15 Ha) adalah sebesar **1.101,40 Ha**.

Tabel 2.12.
Luasan Kawasan Permukiman Kumuh s.d. Tahun 2022
(Baseline RPD Tahun 2024-2026)

Tanggung Jawab dan Peran	RPJMD 2019 -2023 Luasan Kawasan Permukiman Kumuh s.d. 2022			Baseline RPD	
	Luasan Awal Baseline RPJMD (Ha)	Penanganan Baseline RPJMD s.d 2022	Sisa Baseline RPJMD	Sisa Non RPJMD	TOTAL
< 10 Ha	629,01	519,42	109,59	977,60	1,087,19
10-15 Ha	474,66	321,80	152,86	948,16	1.101,02
> 15 Ha	1.900,92	1.592,27	308,65	3.598,26	3.906,91
Jumlah	**3.004,59**	**2.433,49**	**571,10**	**5.523,80**	**6.094,91**

***Sumber**: Dari berbagai sumber pembiayaan, diolah Desember 2024*

Sesuai Baseline RPD tahun 2024-2026, pada tahun 2023 telah tertangani seluas **832,91 Ha** dan pada tahun 2024 tertangani seluas **1.376,99 Ha**, secara lebih jelas sebagaimana rincian tabel berikut :

Tabel 2.13.
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh sesuai Baseline RPD Prov. Jateng
Tahun 2024-2026 periode Penanganan Tahun 2023 – Tahun 2024

Tanggung Jawab dan Peran	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Sesuai Baseline RPD 2024-2026											
	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh s.d. 2022 (Baseline RPD)			Penanganan Tahun 2023			Penanganan Tahun 2024			Total Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh s.d. 2024		
	Sisa Kaw. Kumuh dari Baseline RPJMD 2019-2023	Non RPJMD	Total Luasan Kaw. Kumuh Baseline RPD	Baseline RPJMD	Non RPJMD	TOTAL	Baseline RPJMD	Non RPJMD	TOTAL	Baseline RPJMD	Non RPJMD	TOTAL
< 10 Ha	109,59	977,60	1,087,19	85,47	34,19	119,66	1,51	315,53	317,04	1,51	435,19	436,70
10-15 Ha	152,86	948,17	1.101,02	120,20	16,61	136,81	4,80	253,29	258,09	4,80	390,09	394,90
> 15 Ha	308,65	3.598,04	3.906,91	78,24	498,20	576,44	37,79	764,06	801,86	37,79	1.340,51	1378,30
Jumlah	**571,10**	**5.523,80**	**6.094,91**	**283,91**	**549.00**	**832,91**	**44,11**	**1.332,88**	**1.376,99**	**44,11**	**2.165,79**	**2.209.90**

***Sumber**: Dari berbagai sumber pembiayaan, diolah Desember 2024*

Penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai baseline RPD 2024-2026 adalah seluas 2.209,90 Ha atau sebanyak 95 kawasan permukiman kumuh. Sisa kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah masih ada sebanyak 435 kawasan atau seluas 3.885,01 Ha yang secara detail disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.14.
Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Prov. Jateng Tahun 2024 sesuai Baseline RPD Tahun 2024-2026

Tanggung Jawab dan Peran	Luasan Kawasan Kumuh Baseline RPD Tahun 2024-2026				Penanganan s.d. 2024 (Ha)	% Capaian Kumulatif s.d. Tahun 2024	Sisa Kawasan Kumuh	
	Luasan (Ha)	Jumlah Kawasan	Baseline RPJMD	Non RPJMD			Luasan (Ha)	Jumlah Kawasan
Kab/Kota (< 10 Ha)	1.087,192	237	109,60	977,60	436,702	40,17%	650,490	165
Provinsi (10-15 Ha)	1.101,021	108	152,85	948,17	394,897	35,87%	706,124	94
Pusat (> 15 Ha)	3.906,695	185	308,65	3.598,04	1378,304	35,28%	2528,391	176
Jumlah	**6.094,91**	**530**	**571,10**	**5.523,81**	**2.209,902**	**36,26%**	**3.885,006**	**435**

***Sumber**: Dari berbagai sumber pembiayaan, diolah Desember 2024*

Namun, pada Tahun 2024 s.d. awal Tahun 2025 telah dilaksanakan review ulang SK Kumuh Kabupaten/ Kota dalam rangka penyusunan RPJMN 2025-2029, sehingga luasan kumuh sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 sebesar 5.203,43 Ha dengan perincian pada tabel berikut :

Tabel 2.15.

Luasan Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Jawa Tengah s.d Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Luasan Berdasarkan SK Berkembang Tahun 2025				Total	Penanganan s.d. Tahun 2025 TW I			Total	Sisa Luasan Tahun 2025			Total
		SK Kumuh	<10	10-15	>15		<10	10-15	>15		<10	10-15	>15	
1	Kab. Cilacap	2020	0,00	13,15	126,33	139,48	0,00	13,15	82,57	95,72	0,00	0,00	43,76	43,76
2	Kab. Banyumas	2020	32,76	27,67	55,27	115,70	15,89	19,33	28,90	64,12	16,87	8,34	26,37	51,58
3	Kab. Purbalingga	2021	80,40	48,91	214,97	344,28	23,70	3,60	51,64	78,94	56,70	45,31	163,33	265,34
4	Kab. Banjarnegara	2021	83,51	96,15	292,30	471,96	5,52	12,45	21,75	39,72	77,99	83,70	270,55	432,24
5	Kab. Kebumen	2025	99,20	52,14	0,00	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	52,14	0,00	151,34
6	Kab. Purworejo	2020	15,09	23,50	88,22	126,81	10,82	17,91	88,22	116,95	4,27	5,60	0,00	9,87
7	Kab. Wonosobo	2021	71,63	124,00	624,36	820,00	17,09	27,15	179,67	223,92	54,54	96,85	444,69	596,08
8	Kab. Magelang	2022	116,86	81,94	53,26	252,06	3,46	7,28	0,00	10,74	113,40	74,66	53,26	241,32
9	Kab. Boyolali	2020	0,00	12,69	75,16	87,85	0,00	12,69	43,44	56,13	0,00	0,00	31,72	31,72
10	Kab. Klaten	2023	23,34	37,86	84,56	145,75	4,48	27,72	45,38	77,58	18,86	10,14	39,18	68,18
11	Kab. Sukoharjo	2023	455,35	51,63	113,07	620,06	11,71	0,00	0,00	11,71	443,64	51,63	113,07	608,35
12	Kab. Wonogiri	2022	8,98	24,65	37,87	71,50	8,98	7,92	6,14	23,04	0,00	16,73	31,73	48,46
13	Kab. Karanganyar	2020	79,52	10,38	17,34	107,24	21,61	0,13	4,50	26,24	57,91	10,25	12,84	81,00
14	Kab. Sragen	2022	45,37	22,11	47,03	114,51	38,62	22,11	40,75	101,48	6,75	0,00	6,28	13,03
15	Kab. Grobogan	2020	54,83	0,00	98,88	153,71	24,20	0,00	30,82	55,02	30,63	0,00	68,06	98,69
16	Kab. Blora	2022	56,94	12,16	300,18	369,28	21,16	0,00	23,70	44,86	35,78	12,16	276,48	324,42
17	Kab. Rembang	2020	88,23	96,20	162,80	347,23	52,04	42,16	71,28	165,48	36,19	54,04	91,53	181,75
18	Kab. Pati	2021	48,04	91,73	38,12	177,89	47,24	71,74	33,97	152,95	0,80	19,99	4,15	24,94
19	Kab. Kudus	2023	25,77	0,00	60,23	86,01	19,27	0,00	36,28	55,55	6,50	0,00	23,96	30,46
20	Kab. Jepara	2022	46,98	0,00	20,76	67,7 4	5,38	0,00	0,01	5,39	41,60	0,00	20,75	62,35
21	Kab. Demak	2021	6,38	62,33	142,89	211,60	6,38	21,88	74,47	102,72	0,00	40,46	68,42	108,88
22	Kab. Semarang	2025	40,91	10,17	130,30	181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	10,17	130,30	181,37
23	Kab. Temanggung	2021	5,92	29,54	141,38	176,84	2,25	8,73	75,32	86,30	3,67	20,81	66,06	90,54
24	Kab. Kendal	2025	52,73	10,32	33,10	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	10,32	33,10	96,15

No	Kabupaten/Kota	Luasan Berdasarkan SK Berkembang Tahun 2025				Total	Penanganan s.d. Tahun 2025 TW I			Total	Sisa Luasan Tahun 2025			Total
		SK Kumuh	<10	10-15	>15		<10	10-15	>15		<10	10-15	>15	
25	Kab. Batang	2023	23,66	10,75	70,97	105,38	18,13	0,00	22,43	40,56	5,53	10,75	48,54	64,82
26	Kab. Pekalongan	2021	49,11	53,90	241,20	344,21	29,83	32,11	68,90	130,83	19,28	21,79	172,30	213,38
27	Kab. Pemalang	2024	0,00	10,81	187,45	198,26	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	10,81	186,35	197,16
28	Kab. Tegal	2025	32,16	36,82	105,20	174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	36,82	105,20	174,19
29	Kab. Brebes	2025	258,12	69,18	82,21	409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	258,12	69,18	82,21	409,51
30	Kota Magelang	2022	16,23	10,07	0,00	26,30	10,60	5,11	0,00	15,71	5,63	4,96	0,00	10,59
31	Kota Surakarta	2024	32,70	0,00	30,57	63,27	3,97	0,00	1,90	5,87	28,73	0,00	28,67	57,40
32	Kota Salatiga	2024	28,77	0,00	0,00	28,77	2,88	0,00	0,00	2,88	25,89	0,00	0,00	25,89
33	Kota Semarang	2021	139,54	90,39	201,61	431,54	127,18	75,26	184,52	386,96	12,36	15,13	17,09	44,58
34	Kota Pekalongan	2024	27,64	12,66	103,47	143,77	4,43	0,00	13,02	17,45	23,21	12,66	90,45	126,32
35	Kota Tegal	2022	20,44	0,00	170,71	191,15	20,44	0,00	132,91	153,35	0,00	0,00	37,80	37,80
Jumlah Hasil Rekap			**2.167,11**	**1.233,81**	**4.151,77**	**7.552,70**	**557,27**	**428,42**	**1.363,58**	**2.349,26**	**1.609,84**	**805,40**	**2.788,19**	**5.203,43**

***Sumber**: SK Kawasan Kumuh Kabupaten Kota, diolah, 2025*

Tabel 2.16.
Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh di Jawa Tengah
s.d Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sisa Kawasan			Total
		<10	10-15	>15	
1	Kab. Cilacap	0	0	5	**5**
2	Kab. Banyumas	9	2	3	**14**
3	Kab. Purbalingga	11	4	8	**23**
4	Kab. Banjarnegara	14	8	11	**33**
5	Kab. Kebumen	22	4	0	**26**
6	Kab. Purworejo	2	2	0	**4**
7	Kab. Wonosobo	10	10	19	**39**
8	Kab. Magelang	15	7	3	**25**
9	Kab. Boyolali	0	0	4	**4**
10	Kab. Klaten	3	1	3	**7**
11	Kab. Sukoharjo	121	4	5	**130**
12	Kab. Wonogiri	0	2	2	**4**
13	Kab. Karanganyar	14	1	1	**16**
14	Kab. Sragen	2	0	1	**3**
15	Kab. Grobogan	10	0	5	**15**
16	Kab. Blora	7	1	12	**20**
17	Kab. Rembang	9	6	6	**21**
18	Kab. Pati	1	3	1	**5**
19	Kab. Kudus	3	0	3	**6**
20	Kab. Jepara	7	0	1	**8**
21	Kab. Demak	0	5	8	**13**
22	Kab. Semarang	12	1	4	**17**
23	Kab. Temanggung	1	2	6	**9**
24	Kab. Kendal	11	1	2	**14**
25	Kab. Batang	3	1	3	**7**
26	Kab. Pekalongan	5	5	9	**19**
27	Kab. Pemalang	0	1	6	**7**
28	Kab. Tegal	6	3	5	**14**
29	Kab. Brebes	64	6	4	**74**
30	Kota Magelang	3	1	0	**4**
31	Kota Surakarta	13	0	2	**15**
32	Kota Salatiga	8	0	0	**8**
33	Kota Semarang	9	6	6	**21**
34	Kota Pekalongan	9	1	4	**14**
35	Kota Tegal	0	0	3	**3**
Jumlah Hasil Rekap		**404**	**88**	**155**	**647**

***Sumber**: SK Kawasan Kumuh Kabupaten Kota, diolah, 2025*

c) Pertanahan

Pada indikator sasaran keempat yakni ***persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum,*** serta sasaran kelima yakni ***persentase pelaksanaan reforma agrarian oleh gugus tugas reforma agraria*** telah memenuhi target sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi. Urusan Pertanahan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pemberian izin lokasi

lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah Provinsi, Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi.

Pada Tahun 2024, untuk mendukung kegiatan pembangunan yang ada di Jawa Tengah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, lingkup bidang pertanahan merupakan supporting kegiatan pembangunan fisik yaitu dengan mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran ditetapkannya ijin penetapan lokasi yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan diharapkan mendapat ganti kerugian yang layak dari pemerintah. Penetapan lokasi yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020-2024 berdasarkan kriteria pembangunannya adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.17.
Penetapan Lokasi s.d. Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Penetapan Lokasi	Nomor	Tahun	Keterangan	PSN
	Pembangunan jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api				
1	Persetujuan Perpanjangan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Tambahan Ruas Jalan Tol Trans Jawa	590/14 24 Februari 2020 (TOL TRANS JAWA)	2020	Habis pada tanggal 24 Februari 2021	Tidak
2	Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalur Rel Ganda Kereta Api Solobalapan-Walikukun Kabupaten Sragen	590/33 6 Juli 2020 (KAI SOLOBALAPAN-WALIKUKUN)	2020	Habis pada tanggal 6 Juli 2022	Ya
3	Pembaruan Kedua Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah	590/34 6 Juli 2020 (TOL TRANS JAWA)	2020	Habis pada tanggal 6 Juli 2022	Tidak
4	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta Di	590/38 27 Juli 2020	2020	Habis pada tanggal 27 Juli 2022	Ya

No	Nama Penetapan Lokasi	Nomor	Tahun	Keterangan	PSN
	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali	(JALAN TOL SOLO – YOGYA)			
5	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Kabupaten Klaten	590/48 15-Sep-20 (JALAN TOL SOLO – YOGYA)	2020	Habis pada tanggal 15-Sep-22	Ya
6	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Tol Solo-Mantingan di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen	550/01 15 Januari 2021 (JALAN TOL SOLO - MANTINGAN)	2021	Habis Pada Tanggal 15 Januari 2023	Ya
7	Pembaruan Kedua Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Pekalongan-Semarang Di Provinsi Jawa Tengah	590/02 15 Februari 2021 (JALUR REL KERETA API LINTAS UTARA)	2021	Habis Pada Tanggal 15 Januari 2023	Ya
8	Pembaruan Kedua Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Semarang Tawang- Bojonegoro Di Provinsi	590/03 15 Februari 2021 (JALUR REL KERETA API LINTAS UTARA)	2021	Habis Pada Tanggal 15 Februari 2023	Ya
9	Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Tambahan Ruas Jalan Tol Trans Jawa	590/12 17 Mei 2021 (TAMBAHAN RUAS JALAN TOL TRANS JAWA)	2021	Habis Pada Tanggal 17 Mei 2023	Tidak
10	PenetapanLokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak	590/38 22-Nov-21 (TANAH SISA TOL SEMARANG - DEMAK)	2021	Habis Pada Tanggal 22 November 2024	Ya
11	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang	590/12 14 April 2022	2022	Habis Pada Tanggal 14 April 2025	Ya
12	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Magelang	590/13 20 April 2022	2022	Habis Pada Tanggal 20 April 2025	Ya
13	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Semarang	590/14 21 April 2022	2022	Habis Pada Tanggal 21 April 2025	Ya
14	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Bagi Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 2	590/20 12 Juli 2022	2022	Habis Pada Tanggal 12 Juli 2025	Ya
15	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali	590/23 27 Juli 2022	2022	Habis Pada Tanggal 27 Juli 2023	Ya

No	Nama Penetapan Lokasi	Nomor	Tahun	Keterangan	PSN
16	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Di Kabupaten Klaten	590/34 12 September 2022	2022	Habis Pada Tanggal 12 September 2023	Ya
17	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah	590/22 Juli 2023	2023	Habis Pada Tanggal 25 Juli 2026	Tidak
18	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah	590/42 01/09/2023	2023	Habis Pada Tanggal 18 September 2026	Ya
19	Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas sisa Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak	590/32 5 November 2024 (SISA TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK)	2024	Habis pada tanggal 5 November 2025	Ya
	Pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya				
1	Perpanjangan Atas Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Waduk Pidekso Di Kabupaten Wonogiri	590/20 06/04/2020 (WADUK PIDEKSO)	2020	Habis pada tanggal 06/04/2021	Ya
2	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Slinga Kabupaten Purbalingga	590/21 06/04/2020 (IRIGASI SLINGA)	2020	Habis pada tanggal 06/04/2021	Tidak
3	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Randugunting Kabupaten Blora	590/35 6 Juli 2020 (BENDUNGAN RANDUGUNTING)	2020	Habis pada tanggal 6 Juli 2021	Ya
4	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo	590/539 5 Juni 2020 (BENDUNGAN BENER)	2020	Habis pada tanggal 5 Juni 2021	Ya
5	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang	590/46 01-Sep-20 BENDUNGAN JRAGUNG	2020	Habis pada tanggal 01-Sep-22	Ya
6	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar	590/11 15-Apr-21 (BENDUNGAN JLANTAH)	2021	Habis Pada Tanggal 15 April 2023	Ya
7	Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah	590/20 7 Juni 2021 (BENDUNGAN BENER)	2021	Habis Pada Tanggal 7 Juni 2023	Ya
8	Penetapan Lokasi Pengadan Tanah Tahap II Bagi	590/22 22 Juli 2021 (PIDEKSO)	2021	Habis Pada Tanggal 22 Juli 2024	Ya

No	Nama Penetapan Lokasi	Nomor	Tahun	Keterangan	PSN
	Pembangunna Bendungan Pidekso Di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah				
9	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Slinga Lanjutan di Kabupaten Purbalingga	590/36 12-Nov-21 (D.I. SLINGA LANJUTAN)	2021	Habis Pada Tanggal 12 November 2024	Ya
10	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang	590/31 1 September 2022	2022	Habis Pada Tanggal 1 September 2023	Ya
11	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri	590/43 20 Oktober 2022	2022	Habis Pada Tanggal 20 Oktober 2025	Ya
12	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar	590/44 20 Oktober 2022	2022	Habis Pada Tanggal 20 Oktober 2025	Ya
13	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora	590/52 28 November 2022	2022	Habis Pada Tanggal 28 November 2025	Ya
14	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tingal di Kabupaten Temanggung	590/55 15 Desember 2022	2022	Habis Pada Tanggal 15 Desember 2025	Tidak
15	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas tanah Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupatem Wonosobo Provinsi jawa Tengah	590/19 7 Juni 2023	2023	Habis Pada Tanggal 7 Juni 2026	Ya
16	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora	590/23 Juli 2023	2023	Habis Pada Tanggal 28 Juli 2026	Tidak
17	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Daerah Irigasi Slinga Tahap II di Kabupaten Purbalingga	590/26 Agustus 2023	2023	Habis Pada Tanggal 21 Agustus 2026	Ya
18	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang	590/43 01/09/2023	2023	Habis Pada Tanggal 18 September 2026	Ya
19	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora	590/2 31 Januari 2024 (BENDUNGAN KARANGNONGKO KAB BLORA)	2024	Habis pada tanggal 31 Januari 2027	Ya

No	Nama Penetapan Lokasi	Nomor	Tahun	Keterangan	PSN
20	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bodri di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung	590/24 19 September 2024 (BENDUNGAN BODRI DI KAB KENDAL DAN KAB TEMANGGUNG)	2024	Habis pada tanggal 19 September 2027	Ya
21	Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Slinga Lanjutan di Kabupaten Purbalingga	590/33 12 november 2024 (JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI SLINGA LANJUTAN DI KAB PURBALINGGA)	2024	Habis pada tanggal 12 November 2025	Tidak
22	Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Kedunglanggar di Kabupaten Batang	590/47 20 Desember 2024 (BENDUNGAN KEDUNGLANGGAR DI KAB BATANG)	2024	Habis pada tanggal 20 Desember 2027	Tidak
	Pembangunan pelabuhan, bandar udara, dan terminal				
1	Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Tambahan Lahan Bagi Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solo Balapan-Bandara Adi Soemarmo Di Kabupaten Boyolali Dan Kota Surakarta	590/13 24 Februari 2020 (KAI BANDARA ADI SOEMARMO)	2020	Habis pada tanggal 24 Februari 2022	Ya
	Pembangunan pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik				
1	Pembaharuan Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kV (Ungaran – Pedan) – Mandirancan di Kabupaten Pemalang.	590/6 8 Januari 2020 (SUTET)	2020	Habis Pada Tanggal 8 Januari 2022	Ya
2	Pembaharuan Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kV (Ungaran – Pedan) – Mandirancan di Kota Semarang.	590/2 7 Januari 2020 (SUTET)	2020	Habis Pada Tanggal 7 Januari 2022	Ya
3	Pembaharuan Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kV (Ungaran – Pedan) – Mandirancan di Kabupaten Semarang.	590/2 8 Januari 2020 (SUTET)	2020	Habis Pada Tanggal 8 Januari 2022	Ya
4	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Ampel di Provinsi Jawa Tengah	590/55 12 Oktober 2020 (GITET AMPEL)	2020	Habis pada tanggal 12 Oktober 2022	Ya
5	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	590/33 7 September 2022	2022	Habis Pada Tanggal 7 September 2025	Ya

No	Nama Penetapan Lokasi	Nomor	Tahun	Keterangan	PSN
	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 *Section* 2 (Ampel – Pedan) Di Provinsi Jawa Tengah				
6	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV Ungaran-Pedan Sirkit 2 Section 1 (Ungaran-Ampel) di Provinsi Jawa Tengah	590/13 30 Maret 2023	2023	Habis Pada Tanggal 20 April 2025	Ya
7	Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran-Pedan Sirkuit 2 Section 2 (Ampel-Pedan) di Provinsi Jawa Tengah	590/22 5 September 2024 (SUTET 500kV UNGARAN-PEDAN SIRKUIT 2 SECTION 2 (AMPEL-PEDAN) DI PROVINSI JAWA TENGAH)	2024	Habis pada tanggal 5 September 2025	Ya
8	Pengadaan Tanah Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Pedan-Solo Baru di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo	590/34.1 21 November 2024 (SUTT 150kV PEDAN-SOLO BARU DI KAB KLATEN DAN KAB SUKOHARJO)	2024	Habis pada tanggal 21 November 2027	Tidak
	Pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah				
1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Magelang	590/45 20 Oktober 2022	2022	Habis Pada Tanggal 20 Oktober 2025	Tidak
	Pembangunan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik				
1	Pembaharuan Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap di Kabupaten Cilacap	590/7 15 Januari 2020 (Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap)	2020	Habis Pada Tanggal 15 Januari 2022	Ya
2	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Untuk Kebutuhan Tambahan Lahan Pembangunan REFINERY DEVELOPMENT MASTER PLAN (RDMP) REFINERY UNIT (RU) IV Cilacap di Kabupaten Cilacap	590/05 31 Maret 2021 (RDMP RU CILACAP)	2021	Habis Pada Tanggal 31 Maret 2023	Ya
3	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kampus Politeknik Maritim Negeri Indonesia (POLIMARIN) di Kabupaten Semarang	590/21 30 Juni 2021 (POLIMARIN)	2021	Habis Pada Tanggal 30 Juni 2024	Ya
4	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Kawasan Industri Cilacap Di Kabupaten Cilacap	590/25 5 Agustus 2022	2022	Habis Pada Tanggal 5 Agustus 2025	Ya

***Sumber**: Bidang Pertanahan, Dinas PERAKIM Prov. Jateng Tahun 2020-2024, Diolah 2024*

Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 55 permohonan dengan jumlah bidang sebanyak 24.041 bidang tanah dan luasan sebanyak 3.447,1 Ha.

Selain itu, pada urusan Pertanahan juga dilaksanakan fasilitasi permasalahan pertanahan yang bertujuan untuk meminimalisir konflik pertanahan yang memerlukan penanganan masing-masing pihak baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan. Fasilitasi permasalahan pertanahan dilaksanakan berdasarkan pada surat permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah yang kemudian di teruskan ke Disperakim. Fasilitasi permasalahan pertanahan yang dilakukan oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah s.d. Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18.
Fasilitasi Permasalahan Pertanahan s.d. Tahun 2024
di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Acara	Lokasi	Tahun
1	Kabupaten Banjarnegara	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bummi Unit 2 di Kabupaten Banjarnegara	Balai Kantor Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	2021
2	Kabupaten Klaten	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Listrik Aliran Atas (LAA) Emplastmen Klaten Kabupaten Klaten	Balai RW 005 Kp. Sekalekan Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten	2021
3	Kota Surakarta	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Jalur Ganda Kereta Api Solo-Semarang Fase 1 (Solo Balapan-Kadipiro) Kota Surakarta	Kelurahan Joglo, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Banjarsari	2021
4	Kabupaten Blora	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Fasilitasi Penanganan Aduan Sdr. Wiwit Kurniawan Terkait Pemblokiran Sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora	Kabupaten Blora	2021
5	Kabupaten Klaten	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Rapat Pembahasan Penetapan Hak Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah Umbul Ingas Kepada Pemerintah Desa Cokro Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Ruang Rapat Asisten Sekda Lt. 4 Kantor Gubernur Jawa Tengah	2021

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Acara	Lokasi	Tahun
6	Kota Surakarta	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Fasilitasi Aduan Atas Tanah Bersertifikat HGB yang Terdampak Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Jalur Ganda Kereta Api Solo-Semarang Fase 1 (Solo Balapan-Kadipiro) Kota Surakarta	Kota Samarang dan Kota Surakarta	2021
7	Kabupatn Demak	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Fasilitasi Pertemuan Lintas Sektoral dalam pengukuran tanah Program PTSL di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten demak terhadap 2 (dua) blok bidang tanah yang belum di ukur	Kantor Disperakim Prov. Jawa Tengah dan Kantor Desa Sumberejo dan lokasi PTSL	2021
8	Kota Semarang	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang	Kota Semarang	2022
9	Kota Semarang	Mediasi dan Fasilitasi Permasalahan ganti rugi pada Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Permohonan agar bentuk santunan Madrasah bukan hanya dalam bentuk (uang santunan)	Kota Semarang	2022
10	Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	Permasalahan obyek tanah Makam Daksinoloyo	Kabupaten Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo	2022
11	Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	Permasalahan obyek tanah Makam Pracimaloyo	Kabupaten Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo	2022
12	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	Permasalahan Pertanahan Tanah HM No. 2472 a.n Bambang Mulyo Utomo yang secara administrasi terletak di wilayah Kabupaten Karanganyar namun sertifikat dan izin pemanfaatan ruangnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen	2022
13	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	Permasalahan Pertanahan Tanah HM No. 03671 atas nama Sukir yang secara administrasi terletak di wilayah Kabupaten Karanganyar namun sertifikat dan izin pemanfaatan ruangnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen	2022
14	Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan	Permasalahan pertanahan obyek Umbul yang terletak diwilayah perbatasan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali	2022

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Acara	Lokasi	Tahun
15	Kota Semarang	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang	Kota Semarang	2022
16	Kota Semarang	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II	Kota Semarang	2023
17	Kab. Semarang	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Penyelesaian Permasalahan terkait keberadaan menara Telekomunikasi di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang (Aduan Sdr. Lismanto)	Kab. Semarang	2023
18	Semarang & Demak	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangke Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung)	Semarang & Demak	2023
19	Cilacap	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Penanganan Permohonan Penataan Stasiun Maos Kabupaten Cilacap	Maos, Cilacap	2023
20	Kota Semarang	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Fasilitasi aduan Sartono dengan Ahli Waris Surohadi Sukardi terkait penetapan penerimaan atas ganti kerugian pada pembangunan tanggul laut di Tambak Lorok, Kel. Tanjung Mas	Kota Semarang	2024
21	Semarang & Demak	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Fasilitasi aduan sengketa bidang tanah ahli waris Bp Said dan Ibu Jumirah dan Sartono pada Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak	Semarang & Demak	2024
22	Semarang & Demak	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penyelesaian kendala pembayaran dana kerohiman objek bidang tanah pada Pembangunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Jalan Tol Semarang - Demak	Semarang & Demak	2024
23	Semarang & Demak	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penyelesaian pembayaran dana kerohiman kepada para pemilik tanah yang menjadi objek PDSK Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Tahap III dan Tahap IV	Semarang & Demak	2024
24	Semarang & Demak	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dlm Rangka Pembangunan Nasional	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Jalan Tol Kaligawe – Sayung Seksi 1 Tahap 2	Semarang & Demak	2024

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Acara	Lokasi	Tahun
		Untuk Kepentingan Umum			
25	Kab Kendal	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	Penyelesaian pengajuan keberatan atas Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV KEK Kendal Incomer (Kaliwungu – Weleri) di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Kecamatan Brangsong Kab. Kendal oleh PT. PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Tengah/UPP JBT 4 Semarang	Kab. Kendal	2024
26	Kab. Demak	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Mediasi permasalahan TKD Desa Kedung Malang Kab. Jepara yang saat ini dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Desa Kedungmutih Kab. Demak	Kab. Demak	2024
27	Kab. Pati	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Mediasi upaya penyelesaian permasalahan Pulau Seprapat di Kabupaten Pati	Kab. Pati	2024
28	Kab. Purbalingga	Mediasi Permasalahan Pertanahan	Mediasi permohonan penjelasan pelaksanaan Konsolidasi Tanah oleh Kepala Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kab Purbalingga	Kab. Purbalingga	2024
29	Kab. Cilacap	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penyelesaian pembayaran dana kerohiman kepada para pemilik tanah yang menjadi objek PDSK untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Tipar di Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	2024
30	Semarang & Demak	Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembangunan Nasional Untuk Kepentingan Umum	Penyelesaian pembayaran dana kerohiman kepada para pemilik tanah yang menjadi objek PDSK melalui mekanisme Konsinyasi	Semarang & Demak	2024

***Sumber** : Bidang Pertanahan Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah, 2024 Diolah*

Dan, dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/39 Tahun 2024 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat Provinsi. Reforma agraria yang dilaksanakan oleh DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penataan akses. Disperakim Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 – 2024 telah menyelenggarakan penataan akses reforma agraria melalui pemberdayaan masyarakat sebanyak 33 penataan akses dengan jumlah intervensi 1567 KK. Penataan akses tersebut dilaksanakan berbasis klaster dalam rangka

meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah serta mendorong inovasi kewirausahaan subjek RA sebagai berikut :

Tabel 2.19.
Penataan Akses Reforma Agraria s.d. Tahun 2024
di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Bentuk Penataan Akses	Jumlah (KK)	Tahun
1	Wonosobo	Garung	Kayugiyang	Pelatihan Penyediaan Benih Kentang	107 KK	2019
2	Boyolali	Sawit	Kateguhan	Pelatihan Pemanfaatan Burung Hantu (Tyto Alba) Sebagai Pengendali Hama Tikus	50 KK	2020
3	Boyolali	Banyudono	Trayu	Pelatihan Pemanfaatan Burung Hantu (Tyto Alba) Sebagai Pengendali Hama Tikus	50 KK	2020
4	Rembang	Sedan	Bogorejo	Pelatihan "Pemanfaat Limbah Organik Menjadi Bahan Bioremediasi"	50 KK	2023
5	Klaten	Manisrenggo	Tihayan	Pelatihan "Terapan Pakan Alternatif Budidaya perikanan Air Tawar"	50 KK	2023
6	Sragen	Kalijambe	Bukuran	Pelatihan "Membatik Untuk Meningkatkan Daya Tarik Desa Wisata"	50 KK	2023
7	Banjarnegara	Purwanegara	Parakan	Pelatihan "Terapan Pakan Alternatif Budidaya perikanan Air Tawar"	50 KK	2023
8	Cilacap	Kroya	Ayamalas	Pelatihan "Alternatif Pembuatan Pakan Untuk Budidaya Ikan Air Tawar"	50 KK	2023
9	Purbalingga	Rembang	Panusupan	Pelatihan Pemanfaatn Limbah Sabut kelapa	50 KK	2023
10	Pemalang	Pemalang	Tambakrejo	Pelatihan "Pemanfaat Limbah Organik Menjadi Bahan Bioremediasi"	50 KK	2023
11	Wonosobo	Kertek	Sudungdewo	Pelatihan “Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Menjadi Produk Organik”	50 KK	2024
12	Banyumas	Kembaran	Pliken	Pelatihan “Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Menjadi Produk Organik”	50 KK	2024
13	Blora	Kunduran	Bakah	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	50 KK	2024
14	Karanganyar	Jatiyoso	Karangsari	Pelatihan Penanggulangan Hama Pada Tanaman Padi	50 KK	2024
15	Cilacap	Maos	Glempang	Pelatihan Pemanfaatan Sampah Sebagai Produk Sehari-hari	50 KK	2024

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Bentuk Penataan Akses	Jumlah (KK)	Tahun
16	Wonosobo	Mojo Tengah	Slukatan	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Menjadi Bioaktivatir	50 KK	2024
17	Purbalingga	Rembang	Panusupan	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sabut Kelapa	50 KK	2024
18	Pemalang	Pemalang	Tambakrejo	Pelatihan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga Menjadi Produk Organik	50 KK	2024

***Sumber** : Bidang Pertanahan Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah, 2024 Diolah*

Tabel 2.20.
Realisasi Sertifikasi LP2B di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Sertifikat	Tahun
1	Magelang	Kec. Candi Mulyo	Desa Tampir Kulon	150	2018
2	Purworejo	Kec. Ngombol	Desa Wunut	73	2018
			Desa Sumberejo	79	2018
			Desa Tanjung	30	2018
			Desa Jombang	18	2018
3	Wonosobo	Kec. Garung	Desa Jengkol	77	2018
			Desa Lengkong	80	2018
			Desa Siwuran	46	2018
			Desa Kayugiyang	40	2018
			Desa Kuripan	57	2018
4	Kebumen	Kec. Karanggayam	Desa Karangmaja	30	2018
			Desa Kajoran	40	2018
			Desa Glontor	80	2018
5	Pekalongan	Kec. Doro	Desa Sidoarjo	200	2018
6	Brebes	Kec. Sirampog	Desa Kaliloka	150	2018
7	Demak	Kec. Wonosalam	Desa Kalianyar	128	2018
			Desa Karangrowo	72	2018
8	Jepara	Kec. Donorojo	Desa Blingoh	100	2018
9	Grobogan	Kec. Tegowanu	Desa Tegowanu Wetan	150	2018
10	Blora	Kec. Kunduran	Desa Bakah	200	2018
			Desa Sonokidul	100	2018
11	Boyolali	Kec. Sawit	Desa Kateguhan	49	2018
			Desa Cempaka Sawit	4	2018
			Desa Kemasan	20	2018
			Desa Jatirejo	27	2018
		Kec. Banyudono	Desa Trayu	28	2018
		Kec. Klego	Desa Banyuurip	22	2018
12	Karanganyar	Kec. Jatiyoso	Desa Karangsari	125	2018
		Kec. Ngargoyoso	Desa Jatirejo	70	2018
13	Banyumas	Kec. Kembaran	Desa Pliken	150	2018
14	Kendal	Kec. Cepiring	Desa Korowelanganyar	50	2018
15	Batang	Kec. Wonotunggal	Desa Brayo	146	2018
16	Pati	Kec. Dukuhseti	Desa Grogol	75	2018
			Desa Kembang	75	2018
		Kec. Batangan	Desa Ngening	100	2018
17	Temanggung	Kec. Selopampang	Desa Gambasan	127	2018
18	Pemalang	Kec. Bantar Bolang	Desa Wanarata	210	2018
19	Tegal	Kec. Balapulang	Desa Balapulang Kulon	52	2018

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Sertifikat	Tahun
20	Purbalingga	Kec. Kalimanah	Desa Kedungwuluh	98	2018
21	Rembang	Kec. Sedan	Desa Bogorejo	90	2018
			Desa Menoro	175	2018
22	Sragen	Kec. Sambirejo	Desa Jetis	48	2018
23	Blora	Kec. Kunduran	Desa Sonokidul	100	2019
24	Pemalang	Kec. Pamotan	Pamotan	100	2020
25	Rembang	Kec. Petarukan	Kendalsari	100	2020
26	Blora	Kec. Kunduran	Bejirejo	150	2021
27	Wonosobo	Kec. Selomerto	Simbarejo	150	2021
28	Cilacap	Kec. Maos	Mernek	100	2021
29	Semarang	Kec. Bringin	Gogodalem	50	2022
30	Blora	Kec. Kunduran	Botoreco	50	2022
31	Cilacap	Kec. Sampang	Paberasan	50	2022
32	Wonosobo	Kec. Kertek	Sudungdewo	100	2023
		Kec. Mojotengah	Pungangan	100	2023
33	Blora	Kec. Banjarejo	Sumberagung	200	2023
34	Cilacap	Kec. Maos	Glempang	40	2023
			Kalijaran	70	2023
			Karangrena	110	2023
			Panisihan	30	2023

***Sumber** : Bidang Pertanahan Dinas PERAKIM Provinsi Jawa Tengah, 2024 Diolah*

Kinerja pelayanan perangkat daerah terkait dengan anggaran pendanaan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, secara umum realisasinya masih dibawah anggaran yang ada. Pasca refokusing pada tahun 2020-2021, dimana terjadi deviasi antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya yang cukup besar, karena ketersediaan anggaran diprioritaskan dalam rangka penanganan dan pemulihan kondisi pasca pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan *refocusing* anggaran yang menyebabkan kebutuhan di urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan masih belum dapat terpenuhi sesuai dengan target yang dianggarkan.

Dilema terkait penganggaran kegiatan terulang kembali pada Tahun 2025 dengan diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dimana Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa akan dilakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ikut mengambil kebijakan untuk diterapkan pada OPD terkait. Hal tersebut membuat perubahan pada target dan rencana untuk menanggulangi masalah terkait perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka pencapaian target, perlu didukung oleh adanya anggaran yang mencukupi, konsistensi penganggaran, dan konsistensi kebijakan. Hambatan terbesar dari tidak tercapainya realisasi sesuai dengan target yang ditentukan adalah karena konsistensi penganggaran yang tidak menerus, kosistensi kebijakan terkait dengan pembagian kewenangan pemerintah daerah, besar anggaran yang tidak mencukupi dan kurangnya sinergi antar *stakeholders* yang terkait.

Tabel 2.21.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	**Renstra PD Tahun 2018 - 2023**																	
1	**Indikator Tujuan :**																	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	%	84,24	85,91	87,6	89,28	-	85,49	90,82	94,31	94,84		101,48	105,72	107,66	106,23	-	Tercapai
	Persentase rumah layak huni dan terjangkau yang terpenuhi	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tercapai
	Indikator Sasaran :																	
	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	%	5,95	15,35	26,51	34,16	-	11,24	39,96	58,54	67,70		188,91	260,33	220,82	191,69	-	Tercapai
	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tercapai
	Indikator Program :																	
	1) Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	4,57	7,7	10,5	16,47	-	1,92	3,66	6,71	8,91	-	42,01	47,53	63,9	54,1	-	Tercapai
	2) Persentase rumah tidak layak huni yag tertangani	%	10,35	19,31	28,28	37,24	-	7,06	9,44	11,86	12,6	-	68,21	48,89	41,94	33,83	-	Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	**Indikator Tujuan :**											-					-	
	Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	%	79,29	79,32	79,36	79,36	-	79,44	79,54	79,57	79,57		100,19	100,28	100,26	100,26		Tercapai
	Indikator Sasaran :											-					-	
	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	%	71,03	63,97	56,9	49,83	-	38,22	21,05	15,75	7,92		185,85	303,9	361,27	361,27		Tercapai
	Indikator Program :																	
	1) Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	4,21	7,49	13,79	23,37		7,49	24,12	29,97	31,08		177,91	322,03	217,33	217,33		Tercapai
	2) Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	-	-	17,5	20		-	0	27,5	27,5		0	0	157,14	157,14		Tercapai
	3) Persentase penanganan kawasan kumuh	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	4) Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100		Tercapai
	5) Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3	**Indikator Tujuan :**																	
	Persentase kepastian hukum atas bidang tanah	%	100	100	100	100		199,72	222,96	321,89	100		199,72	222,96	321,89	321,89		Tercapai
	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitai	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	Indikator Sasaran :																	
	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	100	100	100		199,72	222,96	321,89	100		199,72	222,96	321,89	321,89		Tercapai
	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	Persentase pelaksanaan Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	Indikator Program :																	
	1) Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	-	-	-		199,72	-	-	-		199,72	-	-	-		Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2) Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	-	100	100	100		-	222,96	596,81	100		-	222,96	596,81	596,81		Tercapai
	3) Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	%	-	100	100	100		-	-	134,15	100		-	-	134,15	134,15		Tercapai
	4) Persentase pelaksanaan reforma agraria	%	-	100	100	100		-	-	234,73	100		-	-	234,73	234,73		Tercapai
	5) Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	6) Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	7) Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	%	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
4	**Indikator Tujuan :**																	
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	100	100	75	75		83,75	84,75	84,5	82,45		83,75	84,75	112,67	112,67		Tercapai
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	Indikator Sasaran 1 :	Angka	100	100	75	75		83,75	84,75	84,5	82,45		83,75	84,75	112,67	112,67		Tercapai
	1) Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka																

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	71,8	71,95	72,1	72,25		75,44	78,78	79,08	72,25		105,07	109,49	109,68	109,68		Tercapai
	3) Indeks Manajemen Resiko	Angka	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		Tercapai
	Indikator Program :																	
	1) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100		67,32	100	-	-		67,32	100	-	-		Tercapai
	2) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100		Tercapai
	3) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah	%	100	100	100	100		100	-	100	100		100	100	100	100		Tercapai
	4) Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	-		-	-	-	-		100	100	100	100		Tercapai
B	**Renstra PD Tahun 2024 - 2026**																	
1	**Indikator Tujuan :**																	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tercapai
	Persentase rumah layak huni dan	%	-	-	-	-	72,67					73,79					101,54	Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	terjangkau yang terpenuhi																	
	Indikator Sasaran :																	
	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	%	- -	-	-	-	29,69					31,76					106,97	Tercapai
	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat	%	-				20,14					20,33					100,94	Tercapai
	Indikator Program :																	
	1) Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	-	-	-	-	0,48					0,48					100	Tercapai
	2) Persentase rumah tidak layak huni yag tertangani	%	-	-	-	-	4,2					4,2					100	Tercapai
2	**Indikator Tujuan :**																	
	Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	%	-	-	-	-	58,32					63,6					109,05	Tercapai
	Indikator Sasaran :																	
	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	%	-	-	-	-	41,68					36,4					114,51	Tercapai
	Indikator Program :																	
	1) Persentase luasan kawasan	%	-	-	-	-											-	Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	permukiman kumuh yang tertangani																	
	2) Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	-	-	-	-											-	Tercapai
	3) Persentase penanganan kawasan kumuh	%					3,18					3,18					100	Tercapai
	4) Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	-	-	-	-	100					100					100	Tercapai
	5) Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%					100					100					100	Tercapai
3	**Indikator Tujuan :**																	
	Persentase kepastian hukum atas bidang tanah	%	-	-	-	-	-					-					-	Tercapai
	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi	%	-	-	-	-	100					100					100	Tercapai
	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitai	%					100					100					100	Tercapai
	Indikator Sasaran :	%	-	-	-	-	-					-					-	Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum																	
	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	-	-	-	-	100					100					100	Tercapai
	Persentase pelaksanaan Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria	%					100					100					100	Tercapai
	Indikator Program :																	
	1) Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	-	-	-	-	-					-					-	Tercapai
	2) Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	-	-	-	-	-					-					-	Tercapai
	3) Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	%					-					-					-	Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	4) Persentase pelaksanaan reforma agraria	%	-	-	-	-	-					-					-	Tercapai
	5) Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%					100					100					100	Tercapai
	6) Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	-	-	-	-	100					100					100	Tercapai
	7) Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	%					100					100					100	Tercapai
4	**Indikator Tujuan :** Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-	-	-										-	Tercapai
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	-	-	-	-	76					76					100	Tercapai
	Indikator Sasaran 1 :	Angka	-	-	-	-	82					82					100	Tercapai
	1) Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka																
	2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka					-					-					-	Tercapai
	3) Indeks Manajemen Resiko	Angka	-	-	-	-	2,45					2,45					100	Tercapai
	Indikator Program : 1) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan	%	-	-	-	-	100					119,5					119,5	Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	keuangan perangkat daerah																	
	2) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%					-					-					-	Tercapai
	3) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah	%	-	-	-	-	-					-					-	Tercapai
	4) Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%					100					108,08					108,08	Tercapai

Sumber : Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Tabel 2.22.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp. 000)						APBD pada Tahun (Rp. 000)						Realisasi Anggaran Tahun/ Sampai dengan Tahun (Rp. 000)						Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)						Rata – rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pembangunan Perumahan	6.510.000	15.750.000	-	-	-	-	6.510.000	13.886.258	-	-	-	-	6.124.227	11.154.102	-	-	-	-	94,07	80,32					184.406.450	125.746.875
Pengembangan Perumahan	-	-	12.989.600	17.425.000	18.580.000	39.765.000	-	-	11.474.465	19.825.000	53.541.301.000	34.601.321.000	-	-	11.347.803	19.763.534	53.208.885.236	34.585.018.844			98,90	99,69	99,38	99,95	208.763.375	210.393.275
Penanganan Kawasan Permukiman	5.165.000	5.681.500	-	-	-	-	5.165.000	739.557	-	-	-	-	4.460.281	670.117	-	-	-	-	86,36	90,61					- 110.636.075	- 94.754.100
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-	4.193.500	3.300.000	3.300.000	-	-	-	3.042.381	3.300.000	-	-	-	-	3.042.140	3.208.951	-	-			99,99	97,24			6.440.475	4.170.275
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-	-	-	-	-	1.565.000	-	-	-	-	1.022.117.000	1.575.411.000	-	-	-	-	988.524.071	1.574.591.294					96,71	99,95		
Program Kawasan Permukiman	-	-	-	610.000	655.000	5.525.000	-	-	-	610.000	3.847.462.000	3.511.475.000	-	-	-	599.919	3.806.798.086	3.505.450.557				98,35	98,94	99,83		14.997.975
Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.895.000	2.235.000	-	-	-	-	1.895.000	1.094.598	-	-	-	-	1.808.041	1.084.571	-	-	-	-	95,41	99,08					- 20.010.050	- 18.086.750
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	2.085.000	1.200.000	1.344.000	285.000	-	-	1.253.672	1.500.000	1.192.592.000	215.000.000	-	-	1.251.285	1.482.223	1.192.402.518	214.999.238			99,81	98,81	99,98	100,00	6.158.200	5.773.450
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	351.515.000	2.550.000	-	-	-	-	1.865.000	1.171.827	-	-			1.837.250	1.153.003	-	-			98,51	98,39					- 17.329.325	- 17.106.175
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	-	595.000	550.000	575.000	450.000	-	-	343.336	550.000	380.000.000	399.289.000	-	-	343.336	549.915	379.545.600	398.683.784			100,00	99,98	99,88	99,85	5.166.600	5.164.475
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	-	589.500	500.000	540.000	830.000	-	-	276.154	500.000	677.000.000	600.000.000	-	-	276.154	499.996	676.804.600	598.806.284			100,00	100,00	99,97	99,80	5.596.150	5.596.050
Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan	-	-	572.500	500.000	545.000	690.000	-	-	249.360	500.000	569.344.000	590.000.000	-	-	249.360	496.883	569.056.300	588.834.392			100,00	99,38	99,95	99,80	6.266.000	6.188.075

Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp. 000)						APBD pada Tahun (Rp. 000)						Realisasi Anggaran Tahun/ Sampai dengan Tahun (Rp. 000)						Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)						Rata – rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Maksimum dan Tanah Absentee																										
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	5.320.000	7.815.000	-	-	-	-	5.845.000	4.898.556	-	-	-	-	5.115.912	4.298.429	-	-	-	-	87,53	87,75					- 23.661.100	- 20.437.075
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.100.000	-	-	-	-	720.000	520.977	-	-	-	-	647.482	513.167	-	-	-	-	89,93	98,50					- 4.975.575	- 3.357.875
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.778.752	21.915.000	22.461.000	21.800.000	-	-	14.518.567	17.753.221	19.717.024.000	21.882.584.000	-	-	14.298.745	17.414.231	19.142.994.708	20.900.571.316			98,49	98,09	97,09	95,51	80.866.350	77.887.150

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat kondisi kinerja pelayanan perangkat daerah terkait dengan anggaran pendanaan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, secara umum alokasi anggaran dan realisasinya tidak berbeda jauh dengan anggaran dan realisasi yang tercantun dalam dokumen Renstra sebelumnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran pada berbagai program menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari total anggaran yang mencapai sekitar Rp 98,58 triliun, telah terealisasi sebesar Rp 96,55 triliun atau sekitar 98,03%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas program telah mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi yang direncanakan. Beberapa program bahkan mencatat tingkat realisasi yang hampir sempurna, seperti Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian, Penyelesaian Sengketa Tanah, serta Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan realisasi di atas 99%. Namun demikian, masih ada beberapa program yang tingkat realisasinya di bawah 90%, seperti Pembangunan Perumahan, Penanganan Kawasan Permukiman, dan Manajemen Administrasi Perangkat Daerah. Program-program ini perlu mendapatkan perhatian lebih agar pelaksanaannya ke depan dapat lebih optimal. Secara umum, capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup efisien dan efektif dalam mendukung program-program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 2.23.

Capaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	105	105	3.127.242	141	141	3.654.072	70	70	4.621.000	468	468	12.521.796.257	210	210	34.585.018.844	Tercapai
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	11	11		186	186	7.137.696	326	326	15.204.000	287	287	12.078.708.609	253	253		Tercapai

***Sumber** : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025*

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah juga dapat dilihat dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat yang dilaksanakan melalui 4 kegiatan yang mendukung , yaitu :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Selain SPM, kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga mendukung capaian kinerja indikator SDGs Tujuan 11. yaitu Kota dan Permukiman Berkelanjutan dengan indikator proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Dari tahun ke tahun, capaian tersebut juga semakin meningkat. Pada tahun 2024, data asumsi jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data BPS yaitu sebanyak 9.261.697 unit dan 71,76% diantaranya telah memiliki akses hunian layak. Secara rinci, capaian indikator SDGs Tujuan 11. yaitu proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Indikator TPB/ SDGs Bidang Perumahan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS	%	67,93	66,47	67,02	68,85	71,76
			Rumah Tangga	5.818.483	5.771.336	5.847.609	6.029.999	6.646.194

Sumber : Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG's) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Strategi optimalisasi capaian rumah layak huni di Jawa Tengah dilakukan dengan strategi :

1. Penanganan *backlog* kelayakan melalui peningkatan kualitas RTLH bagi masyarakat miskin, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
2. Penanganan *backlog* kepemilikan melalui pembangunan rumah sederhana sehat bagi masyarakat miskin dan pembangunan rumah akibat relokasi program pemerintah.

Upaya tersebut diatas juga terintegrasi dengan penanganan kawasan permukimannya dan prasarana dan sarana utilitasnya (PSU). Selain itu juga mengintegrasikan program – program yang inline mulai dari level kabupaten/kota sampai dengan level pusat, serta melibatkan kemitraan dari berbagai stakeholder. Sehingga intervensi anggaran berasal dari berbagai macam sumber pembiayaan mulai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, CSR, Swasta, Masyarakat dan Baznas.

2.4 Permasalahan Pelayananan Perangkat Daerah

Berikut merupakan permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan yang dimaksud merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah. Permasalahan yang teridentifikasi diharapkan dapat menjawab strategi, arah kebijakan, dan kinerja yang akan diwujudkan pada bab berikutnya. Identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan tabel berikut.

Tabel 2.25.
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, dan pengelolaan pertanahan di Jawa Tengah belum optimal dalam menjawab tantangan pertumbuhan kota, keterbatasan lahan, tata kelola lintas sektor, serta kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.	1. Tingginya tekanan urbanisasi dan keterbatasan lahan belum diimbangi dengan penyediaan hunian layak yang merata dan berkelanjutan. 2. Kebijakan dan perizinan tata ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum sepenuhnya mendukung percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 3. Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman masih belum terintegrasi secara efektif. 4. Struktur kelembagaan daerah yang menangani perumahan dan permukiman belum merata dan belum seluruhnya sesuai dengan kompleksitas kebutuhan. 5. Pengelolaan urusan pertanahan masih tersebar di beberapa instansi dan belum seluruhnya terintegrasi dengan urusan permukiman dan pengembangan wilayah.	1. Belum optimalnya pemanfaatan dan perencanaan ruang (lahan) yang adaptif terhadap pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian. 2. Lemahnya harmonisasi antara kebijakan pusat (Renstra K/L) dan daerah (Renstra PD), terutama dalam hal pengaturan perumahan, permukiman, dan pertanahan. 3. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman. 4. Kurangnya regulasi yang mendorong percepatan reformasi struktural kelembagaan di daerah untuk menangani urusan perumahan dan pertanahan secara terintegrasi. 5. Masih terbatasnya mekanisme koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan perumahan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum. 6. Ketiadaan sistem data spasial yang terintegrasi antara sektor pertanahan, perumahan, dan tata ruang.

***Sumber** : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025*

2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Membangun Indonesia Emas (IE) 2045 merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia, yang tercermikan ke dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Oleh karenanya, harus dilandasi dengan pemikiran bahwa visi bernegara Indonesia selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945 (sebagai acuan utama) yaitu **Merdeka**, **Bersatu**, **Berdaulat**, **Adil** dan **Makmur**. Secara garis besar, Visi Indonesia Emas 2045 tercerminkan dalam lima sasaran utama (visi), yaitu :

1. Pendapatan per kapita setara negara maju,
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang,
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat,
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat, dan
5. Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas Tahun 2045, ditetapkan 8 agenda (misi), 17 tujuan (arah) dan 45 Indikator Utama Pembangunan, sebagaimana dalam lingkup bidang perumahan dan kawasan permukiman (PKP), teramanatkan dalam 4 sektoral yaitu **perumahan**, **air minum**, **sanitasi** dan **persampahan** :

Transformasi Indonesia	1. **Transformasi Sosial** Untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing 2. **Transformasi Ekonomi** Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industry manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestic dan global, serta Pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 3. **Transformasi Tata Kelola** Membangun regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif
Landasan Transformasi	**4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** Dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di Tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan **5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** Dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, Pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam Pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam
Kerangka Implementasi Transformasi	**6. Pembangunan kewilayahan** Untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan Pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah **7. Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan ramah Lingkungan** Menjadi factor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi

8. **Kesinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas**
   Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan Pembangunan.

***Sumber** : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025*

Secara garis besar, upaya-upaya transformasi dan substansi sektor perumahan dan kawasan permukiman dilandasi atas isu-isu strategis nasional, meliputi :

1. Program/kegiatan oleh pemerintah belum melayani seluruh segmentasi masyarakat, terutama bagi MBR dan pekerja sektor informal;
2. Kurangnya pengawasan dalam menjamin keandalan bangunan dan/atau kesesuaian terhadap tata ruang;
3. Belum optimalnya integrasi penyediaan perumahan dengan sarana dan prasarana, khususnya pada aera perkotaan.
4. Pasar pembiayaan primer dan sekunder perumahan yang belum mapan;
5. Manajemen dan pemanfaatan lahan perumahan belum efektif, terutama pada ketersediaan lahan, urban sprawl dan keamanan bermukim;
6. Pencegahan dan pengentasan kumuh belum dilakukan secara terpadu;
7. Terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, khususnya rumah MBR.

Berlandaskan pada isu-isu strategis sektor perumahan, air minum, persampahan dan sanitasi, upaya-upaya yang teramanatkan dalam RPJP Nasional serta capaian-capaian sektoral pada periode sebelumnya, dapat dirumuskan kembali target Indonesia Emas 2045 lingkup bidang perumahan dan kawasan permukiman, sebagaimana berikut :

Tabel 2.26.
Target Indonesia Emas 2045 di Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman

Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan		
	b.) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100

***Sumber :** RPJPN 2025-2045*

Selaras dengan *baseline* dan target yang ditetapkan pada Indonesia Emas 2045, terumuskan strategi-strategi penyediaan perumahan dan permukiman dalam setiap agenda pembangunannya, yaitu pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan difokuskan terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap PDB dan mendorong pertumbuhan perekonomian, melalui :

1. Penyediaan perumahan layak dan terjangkau di Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Strategis lain, khususnya untuk pekerja;
2. Optimalisasi rantai nilai penyediaan perumahan;
3. Penguatan Pasar Pembiayaan Primer dan Sekunder Perumahan;
4. Kemudahan Perizinan dalam Proses Penyediaan Perumahan; dan

5. Pemanfaatan dana murah perbankan dan pengelolaan dana perumahan jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan PKP di Jawa Tengah yang memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerahnya, mendorong kebutuhan untuk merumuskan sebuah parameter dan penanganan yang berbeda-beda antara satu tipologi dengan tipologi lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif-alternatif strategi dan kebijakan yang dinilai lebih detail dan tepat dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran baik untuk jangka panjang jangka menegah maupun di tiap tahunnya. Perkembangan saat ini, permasalahan PKP tidak lagi dipandang sebagai sebuah permasalahan fungsional dan fisik saja, namun dipandang secara lebih luas dan kompleks yang mana memiliki keterkaitan lebih mendalam terhadap dimensi-dimensi kehidupan bermasyarakat, baik dalam sudut pandang aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi maupun dalam sudut pandang politik. Oleh karenanya, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dan menengah di bidang PKP pada Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan kajian-kajian yang sifatnya menyeluruh. Sebagaimana salah satu dari alat analisis yang dapat digunakan adalah analisis SWOT. Pemilihan pemanfaatan analisis ini, didasari atas pertimbangan dalam melakukan pengukuran kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat dalam proses penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dalam prosesnya, akan menentukan prioritisasi kebijakan dan strategi yang selaras dengan karakteristik dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah.

Penerapan analisa SWOT dalam merumuskan arahan kebijakan dan strategis di bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mengidentifikasikan unsur yang dinilai menjadi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) yang berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah secara internal kelembagaan. Selain itu, dalam prosesnya turut mempertimbangkan Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threat*) dari luar kelembagaan atau yang sedang menjadi trend pada sektor perumahan. Tabel SWOT untuk menyusun strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.27.
Analisa SWOT Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah

SWOT	Penjabaran SWOT
Strenght (Kekuatan)	• Sistem Informasi Pendataan Perumahan (SIMPERUM) • PKS (kemitraan) PTN/S, BPR/BKK, Pokmas, dan lainnya • Program “Tuku lemah Oleh Omah” • Program “OPTIMIS” • Sistem Informasi Kawasan Permukiman • Penyediaan PSU Permukiman dan Hari Habitat • Gugus Tugas Reforma Agraria • Tim Persiapan Pengadaan Tanah di Prov. Jateng • Pelaksanaan SRP2 • Pokja PKP dan Forum PKP

SWOT	Penjabaran SWOT
Weakness (Kelemahan)	• Updating dan/atau akurasi data calon penerima bantuan • Rasio anggaran terhadap data eksisting permasalahan PKP • Kuantitas dan Kualitas SDM terbatas • Implementasi peran pengawasan dan pengendalian PKP • Implementasi peran Pokja PKP dan Forum PKP • Implementasi kemitraan dalam penyelesaian permasalahan PKP • Peran pemerintah daerah Provinsi untuk mengintervensi permasalahan PKP di daerah yang terbatas oleh regulasi • Penyelenggaraan penataan akses reforma agraria belum optimal di tingkat Kabupaten/Kota
Opportunity (Peluang)	• Sinergitas kebijakan, strategi, metadata, program dan kegiatan secara vertical dan/atau horizontal • PSN yang terdapat di dan/atau melintasi wilayah Jawa Tengah • Program Pembangunan 3 Juta Rumah, 1 Juta Rumah di Perkotaan, 2 Juta Rumah di Perdesaan • Program BSPS, IGAHP, dan pembiayaan perumahan lainnya • Hunian Berimbang • Kolaborasi penyelesaian PKP di Provinsi Jawa Tengah dalam berbagai sektor dan aspek • Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia yang heterogen. • Terapan Rekayasa Teknologi bidang PKP • Penetapan KRB oleh BPBD
Threats (Tantangan)	• Keterbatasan Lahan • Inflasi harga lahan, material dan/atau lainnya • Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat terhadap mekanisme dan standar teknis Pembangunan rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan dengan lingkungan yang sehat • Tingkat kesejahteraan (perekonomian) masyarakat • Komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar sectoral (vertical/horizontal) yang rendah • Budaya “hunian” Masyarakat • Standar dan mekanisme “pemberian bantuan” terhadap kebijakan penyaluran bantuan dari pemerintah • Komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pertanahan dan Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan

Sumber : *Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025*

Analisis SWOT tersebut menjadi dasar dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus utama dalam perencanaan ke depan. Analisis SWOT memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi organisasi saat ini, baik dari faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil analisis tersebut, isu strategis dirumuskan sebagai titik-titik krusial yang muncul dari interaksi antar faktor SWOT dan memerlukan perhatian serta penanganan khusus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2.28.
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan rumah di kawasan rentan bencana	Permukiman tumbuh di wilayah pesisir (rawan banjir dan rob)	Daya dukung lingkungan rendah	Kenaikan muka laut akibat perubahan iklim dan pemanasan global	Urbanisasi pesisir memperparah rob	Penurunan muka tanah di Pekalongan, Demak, dan Semarang	Rehabilitasi/ penyediaan rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah Provinsi
Penurunan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman	Tumbuh dan berkembang nya kawasan kumuh	Daya dukung lingkungan rendah	Urbanisasi yang cepat menambah beban pada infrastruktur dan menciptakan ketimpangan dalam askes layanan dasar	Urbanisasi cepat tanpa kontrol tata ruang yang memadai	Permukiman kumuh di pinggiran kota, bantaran sungai, hingga wilayah pesisir	Pengentasan kawasan kumuh dan pencegahan tumbuh berkembang nya kawasan kumuh
Pengelolaan sanitasi dan air limbah	Penyediaan PSU Permukiman yang kurang memadai	Pencemaran air oleh *grey* water domestik	Akses sanitasi layak sebagai SDGs global	Keterbatasan sistem SPALD dan sarana pengolahan limbah	Wilayah pesisir alami penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan	Peningkatan kualitas PSU guna mendukung kawasan permukiman yang adaptif, berbasis lingkungan dan berkelanjutan
Pengendalian pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman	Tingginya kebutuhan *backlog* kepemilikan dan pertumbuhan *backlog* kelayakan	Degradasi kawasan lindung dan RTH	Tekanan terhadap ruang urban di negara berkembang	Alih fungsi lahan pertanian ke perumahan tidak terkendali	Kota dengan dominasi lahan terbangun hingga 58%	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan penyediaan/ pembangunan baru rumah layak huni, serta peningkatan tata kelola agraria
Ketahanan permukiman terhadap bencana	Kawasan permukiman berada di kawasan	Keterpaparan tinggi terhadap bencana	Risiko bencana akibat intensitas	Kawasan permukiman berada di zona risiko	Data wilayah dengan paparan	Rehabilitasi/ penyediaan rumah korban

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	rawan bencana		cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi	tinggi (banjir, likuefaksi, longsor)	tinggi bencana (Demak, Pekalongan)	bencana dan relokasi program pemerintah Provinsi

***Sumber** : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025*

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan. Cara merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

a. Tujuan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan *ultimate outcome* secara spesifik dan terukur untuk menangani isu strategis yang menggambarkan fungsi layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan perangkat daerah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni :

1. Meningkatkan kualitas permukiman dan agraria bagi masyarakat; dan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis.

b. Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan perangkat daerah diatas, kemudian diturunkan dalam rumusan sasaran perangkat daerah yang merupakan kondisi hasil yang diharapkan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sasaran dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani dan profil layanan tiap perangkat daerah. Indikator kinerja sasaran yang akan dicapai merupakan *intermediate outcome* atau *outcome* jangka menengah. Sasaran perangkat daerah yang akan dicapai sebagai penjabaran tujuan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, yakni :

1. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni;
    - Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat; dan
    - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat;
2. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman;
    - Penurunan luasan kawasan kumuh;
3. Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
4. Terlaksananya Reforma Agraria di Jawa Tengah;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.

Lebih lanjut, tujuan dan sasaran serta indikator dan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, dapat diuraikan melalui tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Sat	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Agraria bagi Masyarakat												
			Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan	%	0	63,60	60,58	62,66	64,73	66,81	68,88	70,96	70,96
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	68,85	71,76	72,99	74,54	76,08	77,63	79,18	80,72	80,72
			Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi*)	%	0	100	100	55,50	58,30	61,10	63,80	66,60	66,60
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman											
			Persentase Kawasan Kumuh*)	%	0	36,40	39,42	37,34	35,27	33,19	31,12	29,04	29,04
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni											
			Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni*)	%	0	31,76	4,94	9,88	14,82	19,76	24,70	29,64	29,64

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Sat	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat*)	%	0	20,33	20,39	9,65	14,48	19,30	24,13	28,95	28,95
		Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum											
			Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		Terlaksananya Reforma Agraria di Jawa Tengah											
			Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA*)	%	0	100	100	22,20	27,70	33,30	38,80	44,40	44,40
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis												
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	0	78	78	79	80	81	82	83	83
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas											

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Sat	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	84,30	90,50	91,50	91,60	91,70	91,80	91,90	92,00	92,00
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman											
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	0	3,03	3,04	3,06	3,08	3,1	3,12	3,14	3,14

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

*) Keterangan :

- Perhitungan target capaian pada Tahun 2025-2029 mengalami perubahan *baseline*
- Terdapat indikator baru untuk Tahun 2025-2029 sehingga beberapa kondisi awal kinerja pada Tahun 2023-2024 pada indikator tersebut tidak terisi.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan serangkaian tahapan atau langkah yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Sementara itu, kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan dirancang untuk menjembatani strategi dengan sasaran secara lebih operasional, sehingga strategi yang disusun menjadi lebih spesifik, terfokus, konkret, dan dapat diterapkan. Selain itu, kebijakan berperan dalam mengarahkan pemilihan kegiatan agar sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas permukiman dan agraria bagi masyarakat	**SASARAN 1.1** Meningkatnya jumlah rumah layak huni	**STRATEGI 1.1.1** Penuntasan *Backlog* Kelayakan di Kawasan Permukiman Perdesaan dan Perkotaan	Pengembangan Perumahan di Jawa Tengah yang Layak Huni, Terjangkau, dan Berkelanjutan
		STRATEGI 1.1.2 Penuntasan *Backlog* Kelayakan Miskin di Kawasan Kumuh	
		STRATEGI 1.1.3 Pencegahan Pertumbuhan *Backlog* Kelayakan	
		STRATEGI 1.1.4 Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni dan Terjangkau bagi Masyarakat	
		STRATEGI 1.1.5 Penanganan Rumah Pasca Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	
		STRATEGI 1.1.6 Peningkatan Kawasan Permukiman yang Adaptif Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
		STRATEGI 1.1.7 Penanganan Kawasan Kumuh secara Kolaboratif	
		STRATEGI 1.1.8	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penyediaan PSU Permukiman Berbasis Tingkat Kerawanan Sektor	
		STRATEGI 1.1.9 Pencegahan Tumbuhnya Kawasan Kumuh Baru	
	SASARAN 1.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	**STRATEGI 1.2.1** Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan kawasan permukiman yang adaptif, berbasis lingkungan, dan terintegrasi dengan PSU
		STRATEGI 1.2.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Rawan Kumuh	
		STRATEGI 1.2.3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan	
		STRATEGI 1.2.4 Penyiapan Bahan Pemanfaatan dan Penguatan Rekayasa Teknologi	
		STRATEGI 1.2.5 Implementasi Pemanfaatan dan Penguatan Rekayasa Teknologi	
		STRATEGI 1.2.6 Penyediaan Data, Evaluasi, Kebijakan, Strategi, Pembinaan, dan Pengawasan	
		STRATEGI 1.2.7 Penguatan Kolaborasi dan Integrasi Peran POKJA dan FORUM PKP	
	SASARAN 2.1 Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	**STRATEGI 2.1.1** Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pengadaan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah
	SASARAN 2.2 Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah	**STRATEGI 2.1.2** Penyelesaian Sengketa Pertanahan	
		STRATEGI 2.1.3 Reforma Agraria	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, arah kebijakan dan strategi tersebut kemudian dijabarkan dalam pentahapan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Pentahapan dalam Renstra juga disusun dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Pentahapan dimaksud disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
"Penguatan Perumahan dan Kawasan Perumkiman, serta Pengelolaan Pertanahan dalam Mendukung Ketahanan Pangan"	***"Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pengelolaan Pertanahan dalam Mendukung Ekonomi Syariah & Wisata"***	***"Pemerataan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pengelolaan Pertanahan dalam Mendukung Desa dan Industri Hijau"***	***"Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdaya Saing, serta Tertib Administrasi Pertanahan untuk Jawa Tengah Maju"***	***"Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan untuk Jawa Tengah Mandiri dan Berkelanjutan"***
Menguatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berkelanjutan, serta pengelolaan pertanahan yang terintegrasi dengan wilayah sentra produksi pangan	Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta pengelolaan pertanahan berbasis pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah	Memeratakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta redistribusi akses dan aset reforma agraria berbasis potensi desa dan industri hijau yang ramah lingkungan	Mengonsolidasikan capaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta penyelenggaraan pertanahan untuk mewujudkan daya saing daerah menuju Jawa Tengah maju dan berkelanjutan	Mengokohkan capaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan melalui konsolidasi kebijakan, inovasi tata kelola, serta penguatan kemandirian daerah dalam penyediaan hunian layak, kawasan adaptif, dan ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan menuju Jawa Tengah yang mandiri dan sejahtera.

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

3.3. Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 3.4
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Agraria bagi Masyarakat							Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	TW I-TW IV
	Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan	Terbatasnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan	12 (Tinggi)	Adanya ketimpangan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan yang tidak terkoneksi pada sistem kawasan permukiman	Tidak semua masyarakat mendapatkan akses terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan	Melakukan pemantauan, pencegahan, dan penanganan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh secara kolaboratif dari berbagai sumber pembiayaan		
		Penetapan kembali/ baru SK Kumuh Kab/Kota oleh Bupati/ Walikota	12 (Tinggi)	Kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang permukiman tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pertumbuhan luasan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah	Melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah secara terpadu dengan sektor terkait dari berbagai sumber pembiayaan		
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Terbatasnya akses terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan sarana dan	15 (Sangat Tinggi)	Masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk	Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau	Melakukan penyediaan rumah yang layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk		

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		prasarana yang memadai untuk masyarakat secara berkeadilan		memperoleh rumah yang layak huni		masyarakat secara berkeadilan dari berbagai sumber pembiayaan		
		Program penyediaan akses air minum dan sanitasi untuk pembangunan rumah di Provinsi Jawa Tengah belum optimal	15 (Sangat inggi)	Masih belum terintegrasinya pembangunan rumah dengan penyediaan akses air minum dan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah	Pemenuhan rumah tidak sesuai dengan kriteria rumah layak huni yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian PUPR (ketahanan bangunan, luas per kapita, ketersediaan akses air minum dan sanitasi)	Melakukan kolaborasi penyediaan rumah yang layak huni dengan Pemerintah Daerah maupun stakeholders terkait untuk memenuhi 4 kriteria rumah layak huni		
	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pengadaan tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional/daerah maupun rencana strategis	9 (Sedang)	Dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemrakarsa tidak sesuai dengan perkembangan area yang menjadi obyek	Proses pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan	Meningkatkan koordinasi Tim Persiapan Pengadaan Tanah dalam setiap tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum		
	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	Terdapat ketimpangan penguasaan tanah dan penggunaan tanah, guna dimanfaatkan oleh masyarakat.	12 (Tinggi)	Rendahnya sumber daya masyarakat terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimiliki	Tidak tersedianya akses penggunaan dan pemanfaatan tanah.	Integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi Reforma Agraria antara Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama K/L dan stakeholders terkait		

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Terdapat ketimpangan pengaturan Bank Tanah dengan upaya internalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah masyarakat	12 (Tinggi)	Rendahnya pemasyarakatan pengaturan Bank Tanah sesuai sumber daya yang dimiliki masyarakat	Tidak tersedianya media sosialisasi kepada masyarakat yang murah tepat dan mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi	Integrasi sinkronisasi kolaborasi pemasyarakatan pengaturan Bank Tanah dalam kerangka RA antara Pemda dst sama		
Sasaran 1.1. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman								
	Persentase Kawasan Kumuh	Penetapan profil pembentukan kawasan kumuh Kab/Kota sebagai dasar besaran luasan dalam SK Kumuh Kab/Kota tidak sesuai		Penggabungan/ pemisahan kawasan kumuh yang tidak sinkron antara Kab/ Kota dengan Provinsi dan Pusat	Delineasi luasan kawasan permukiman kumuh tidak jelas kewenangannya	Menyusun berita acara penetapan luasan kawasan kumuh di akhir tahun sebagai dasar perubahan/ penetapan SK Kumuh Bupati/ Walikota		
Sasaran 1.2. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni								
	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Pertumbuhan jumlah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni berdasarkan Data Terpadu	15 (Sangat Tinggi)	Masyarakat tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memperbaiki rumahnya atau berpindah ke lokasi tempat tinggal yang	Masyarakat menempati rumah yang tidak layak huni dan/ atau pada lokasi yang tidak aman	Menyediakan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni maupun rumah terdampak bencana kepada masyarakat miskin dari berbagai sumber pembiayaan		

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kesejahteraan Sosial (DTKS)		lebih layak dan aman		(APBN, APBD Prov, Kab/Kota, CSR, BAZNAS, Swadaya,dll)		
	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat	Kenaikan harga rumah yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin non bankable	15 (Sangat Tinggi)	Masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memperoleh rumah yang layak huni, serta keterbatasan lahan untuk permukiman dengan harga yang meningkat cukup cepat setiap tahunnya	Masyarakat tidak memiliki rumah yang layak untuk ditinggali	Menyediakan bantuan pembangunan rumah baru bagi masyarakat miskin dan fasilitasi akses pembiayaan kredit mikro secara kolaboratif dengan stakeholder terkait dari berbagai sumber pembiayaan		
Sasaran 1.3. Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum								

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Tidak adanya dukungan masyarakat terhadap penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum	12 (Tinggi)	Informasi terkait dengan penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak tersampaikan dengan lengkap	Pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat terealisasi	Menginsentifkan koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi yang membutuhkan tanah, Kantor Pertanahan, APH serta stakeholder terkait dalam penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah		
		Tidak adanya kepastian hukum hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah terhadap penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	9 (Sedang)	Kurangnya kesadaran dari pihak-pihak terkait terhadap tertib administrasi pertanahan	Pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat terealisasi	Menginsentifkan koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi yang membutuhkan tanah, Kantor Pertanahan, APH serta stakeholder terkait dalam penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah		
Sasaran 1.4. Terlaksananya Reforma Agraria di Jawa Tengah								

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA	Sumber daya masyarakat sebagai obyek Penyelenggraan Reforma Agraria di Kabupaten/Kota tidak sinkron dengan rencana kerja GTRA Provinsi	9 (Sedang)	Kurangnya relevansi Renja GTRA Kabupaten/ Kota dengan Renja GTRA Provinsi	Penyelenggraaan Reforma Agraria tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan sumber daya masyarakat	Optimalisasi implementasi Renja GTRA Provinsi dalam penajaman program kegiatan Reforma Agraria pada GTRA Kabupaten/Kota sejalan dengan mekanime perencanaan pembangunan daerah.		
Tujuan 2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis								
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil rendah	9 (Sedang)	Rendahnya capaian kinerja Disperakim Prov.Jateng, serta kurangnya data dukung dalam pemenuhan 8 (delapan) area perubahan	Penurunan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	- Updating data dan kearsipan - Meningkatkan koordinasi dengan Biro Organisasi Setda Prov.Jateng"		
Sasaran 2.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Hasil Penjaminan Kualitas jauh lebih rendah dari Penilaian Mandiri Manajemen Risiko	9 (Sedang)	- OPD belum memiliki karakteristik pendekatan Manajemen Risiko - OPD telah memiliki kebijakan terkait Manajemen Risiko namun belum dikomunikasikan, diimplementasikan dan belum menetapkan selera risiko - Tim Pengelolaan Risiko Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak memahami penerapan SPIP	Menurunnya karakteristik Level Kelompok Indeks Manajemen Risiko pada Disperakim Prov.Jateng	- Melaksanakan FGD Penyelenggaraan SPIP dan Maturitas SPIP lingkup Disperakim Prov.Jateng - Meningkatkan koordinasi dengan tim APIP sebagai Penjamin Kualitas - Melakukan updating data dan kearsipan		
Sasaran 2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Uraian kinerja hasil survey e-SKM kurang baik	6 (Sedang)	- Kesulitan dalam memperoleh responden - Beberapa responden kurang memahami tata cara pengisian kuesioner e-SKM	Penurunan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	- Meningkatkan koordinasi dengan Bidang teknis lingkup Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah - Memperkenalkan kegiatan Disperakim Provinsi Jawa Tengah kepada Masyarakat		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rincian program, kegiatan, dan sub-kegiatan beserta alokasi pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2025-2029 telah disusun sesuai dengan nomenklatur yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Agraria bagi Masyarakat *									31.157.000.000		31.723.000.000		33.209.600.000		34.423.000.000		36.585.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan *	%	63,6	60,58	62,66		64,73		66,81		68,88		70,96		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan *	%	71,76	72,99	74,54		76,08		77,63		79,18		80,72		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi *	%	100	100	55,5		58,3		61,1		63,8		66,6		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum *	%	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni **									21.742.000.000		22.166.000.000		23.220.600.000		24.011.000.000		25.813.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni **	%	31,76	4,94	9,88	12.142.000.000	14,82	12.144.000.000	19,76	12.068.000.000	24,7	13.401.000.000	29,64	13.470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN ***							12.142.000.000		12.144.000.000		12.068.000.000		13.401.000.000		13.470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani ***	%	4,2	8,32	20,3	12.142.000.000	27,02	12.144.000.000	33,74	12.068.000.000	40,48	13.401.000.000	47,18	13.470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****							180.000.000		189.000.000		100.000.000		140.000.000		200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tersusunnya Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ****	Dokumen	2	2	1	180.000.000	1	189.000.000	1	100.000.000	1	140.000.000	1	200.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi *****							180.000.000		189.000.000		100.000.000		140.000.000		200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tersusun dan Terverifikasi nya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi *****	Dokumen	2	2	1	180.000.000	1	189.000.000	1	100.000.000	1	140.000.000	1	200.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****							140.000.000		147.000.000		160.000.000		168.000.000		177.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana ****	Dokumen	1	1	1	140.000.000	1	147.000.000	1	160.000.000	1	168.000.000	1	177.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana *****							140.000.000		147.000.000		160.000.000		168.000.000		177.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana *****	Orang	260	200	200	140.000.000	200	147.000.000	200	160.000.000	200	168.000.000	200	177.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****							9.362.000.000		9.258.000.000		9.258.000.000		10.543.000.000		10.543.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana ****	Unit	210	170	175	9.362.000.000	170	9.258.000.000	170	9.258.000.000	205	10.543.000.000	145	10.543.000.000	Pokja Perumahan Umum	
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana *****							2.912.000.000		2.808.000.000		2.808.000.000		3.393.000.000		3.393.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi *****	Unit Rumah	175	150	125	2.912.000.000	120	2.808.000.000	120	2.808.000.000	145	3.393.000.000	145	3.393.000.000	Pokja Perumahan Umum	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana *****							6.450.000.000		6.450.000.000		6.450.000.000		7.150.000.000		7.150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun *****	Unit Rumah	35	20	50	6.450.000.000	50	6.450.000.000	50	6.450.000.000	60	7.150.000.000	60	7.150.000.000	Pokja Perumahan Umum	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****							2.460.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****	Unit	17325	17000	17000	2.460.000.000	17000	2.550.000.000	17000	2.550.000.000	17000	2.550.000.000	17000	2.550.000.000	Pokja Perumahan Swadaya	
	1.04.02.1.04.0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi *****							2.460.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah *****	Rumah Tangga	17325	17000	17000	2.460.000.000	17000	2.550.000.000	17000	2.550.000.000	17000	2.550.000.000	17000	2.550.000.000	Pokja Perumahan Swadaya	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat **	%	20,33	20,39	9,65	9.600.000.000	14,48	10.022.000.000	19,3	11.152.600.000	24,13	10.610.000.000	28,95	12.343.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN ***							9.200.000.000		9.610.000.000		10.720.000.000		10.150.000.000		11.860.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tersedianya Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan ***	%	0,48	0,73	0,69	9.200.000.000	0,97	9.610.000.000	1,28	10.720.000.000	1,57	10.150.000.000	1,91	11.860.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****							300.000.000		100.000.000		110.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tersusunnya Dokumen Pendataan Penyediaan Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi ****	Dokumen	N/A	2	1	300.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi *****							300.000.000		100.000.000		110.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Tersusun dan Terverifikasi nya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi *****	Dokumen	N/A	N/A	1	300.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ****							8.900.000.000		9.510.000.000		10.610.000.000		9.950.000.000		11.660.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Terlaksananya Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Unit Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi ****	Unit	253	100	100	4.450.000.000	100	4.450.000.000	100	4.450.000.000	100	4.450.000.000	125	5.500.000.000	Pokja Perumahan Umum	
	1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi *****							4.450.000.000		4.450.000.000		4.450.000.000		4.450.000.000		5.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan	
			Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun *****	Unit Rumah	253	100	100	4.450.000.000	100	4.450.000.000	100	4.450.000.000	100	4.450.000.000	125	5.500.000.000	Pokja Perumahan Umum	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan
			Terlaksananya Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Unit Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi Masyarakat Miskin ****	Unit	581	240	100	4.450.000.000	115	5.060.000.000	140	6.160.000.000	125	5.500.000.000	140	6.160.000.000	Pokja Perumahan Swadaya	
	1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi *****							4.450.000.000		5.060.000.000		6.160.000.000		5.500.000.000		6.160.000.000		
			Terbangunnya Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi Masyarakat	Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang Disediakan *****	Unit	581	240	100	4.450.000.000	115	5.060.000.000	140	6.160.000.000	125	5.500.000.000	140	6.160.000.000	Pokja Perumahan Swadaya	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Perumahan

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ***							400.000.000		412.000.000		432.600.000		460.000.000		483.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Pembinaan kepada Orang/ Badan Hukum dalam rangka Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan ***	%	100	100	6,84	400.000.000	10,04	412.000.000	13,24	432.600.000	16,43	460.000.000	19,63	483.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah ****							400.000.000		412.000.000		432.600.000		460.000.000		483.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Pembinaan kepada Orang/ Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan ****	Orang	13	44	50	400.000.000	50	412.000.000	50	432.600.000	50	460.000.000	50	483.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah *****							400.000.000		412.000.000		432.600.000		460.000.000		483.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah *****	Laporan	1	1	1	400.000.000	1	412.000.000	1	432.600.000	1	460.000.000	1	483.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman **									7.815.000.000		7.901.000.000		8.273.000.000		8.610.000.000		8.903.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Kawasan Kumuh **	%	36,4	39,42	37,34	7.815.000.000	35,27	7.901.000.000	33,19	8.273.000.000	31,12	8.610.000.000	29,04	8.903.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN ***							3.990.000.000		4.107.000.000		4.293.000.000		4.470.000.000		4.630.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Tertangannya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh ***	%	35,87	49,49	14,9	3.990.000.000	27,32	4.107.000.000	39,73	4.293.000.000	52,15	4.470.000.000	64,56	4.630.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ****							190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ****	Laporan	3	3	10	190.000.000	10	190.000.000	10	190.000.000	10	190.000.000	10	190.000.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	
	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh *****							190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh *****	Orang	120	105	350	190.000.000	350	190.000.000	350	190.000.000	350	190.000.000	350	190.000.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Kawasan Permukiman

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ****							3.800.000.000		3.917.000.000		4.103.000.000		4.280.000.000		4.440.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Telaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ****	Ha	394,9	150	100	3.600.000.000	100	3.713.000.000	100	3.893.000.000	100	4.062.000.000	100	4.215.000.000	Pokja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *****							100.000.000		104.000.000		108.000.000		112.000.000		115.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki *****	Unit Rumah	852	584	600	100.000.000	650	104.000.000	700	108.000.000	750	112.000.000	800	115.000.000	Pokja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *****							3.500.000.000		3.609.000.000		3.785.000.000		3.950.000.000		4.100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar *****	Ha	394,8	150	15	3.500.000.000	18	3.609.000.000	20	3.785.000.000	22	3.950.000.000	24	4.100.000.000	Pokja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Kawasan Permukiman
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ****	Laporan	N/A	3	2	200.000.000	2	204.000.000	2	210.000.000	2	218.000.000	2	225.000.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *****							200.000.000		204.000.000		210.000.000		218.000.000		225.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha *****	Laporan	N/A	3	2	200.000.000	2	204.000.000	2	210.000.000	2	218.000.000	2	225.000.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Kawasan Permukiman
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN ***							925.000.000		810.000.000		850.000.000		870.000.000		887.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ***	%	N/A	100	100	925.000.000	100	810.000.000	100	850.000.000	100	870.000.000	100	887.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ****							925.000.000		810.000.000		850.000.000		870.000.000		887.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ****	Laporan	1	1	2	400.000.000	2	410.000.000	2	430.000.000	2	440.000.000	2	457.000.000	Pokja Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman *****							400.000.000		410.000.000		430.000.000		440.000.000		457.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman *****	Laporan	1	1	2	400.000.000	2	410.000.000	2	430.000.000	2	440.000.000	2	457.000.000	Pokja Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum ****	Laporan	N/A	N/A	2	525.000.000	2	400.000.000	2	420.000.000	2	430.000.000	2	430.000.000	Pokja Kemitraan Strategis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum *****							525.000.000		400.000.000		420.000.000		430.000.000		430.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum *****	Laporan	N/A	N/A	2	525.000.000	2	400.000.000	2	420.000.000	2	430.000.000	2	430.000.000	Pokja Kemitraan Strategis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) ***							2.900.000.000		2.984.000.000		3.130.000.000		3.270.000.000		3.386.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan ***	%	40	60	16,92	2.900.000.000	35,38	2.984.000.000	55,38	3.130.000.000	76,92	3.270.000.000	100	3.386.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman ****							2.900.000.000		2.984.000.000		3.130.000.000		3.270.000.000		3.386.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Terselenggaranya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman ****	Laporan	N/A	1	1	2.900.000.000	1	2.984.000.000	1	3.130.000.000	1	3.270.000.000	1	3.386.000.000	Pokja Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman *****	Laporan	2	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Pokja Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Kawasan Permukiman
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman *****							2.800.000.000		2.884.000.000		3.030.000.000		3.170.000.000		3.286.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman	
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum *****	Lokasi	2	1	11	2.800.000.000	12	2.884.000.000	13	3.030.000.000	14	3.170.000.000	15	3.286.000.000	Pokja Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Kawasan Permukiman
Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum **									400.000.000		410.000.000		430.000.000		450.000.000		470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum **	%	100	100	100	400.000.000	100	410.000.000	100	430.000.000	100	450.000.000	100	470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ***							400.000.000		410.000.000		430.000.000		450.000.000		470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terfasilitasinya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi ***	%	100	100	100	400.000.000	100	410.000.000	100	430.000.000	100	450.000.000	100	470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi ****							400.000.000		410.000.000		430.000.000		450.000.000		470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Tersusunnya Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ****	Dokumen	7	5	2	400.000.000	2	410.000.000	2	430.000.000	2	450.000.000	2	470.000.000	Pokja Fasilitasi Pengadaan Tanah	
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum *****							400.000.000		410.000.000		430.000.000		450.000.000		470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah *****	Dokumen	7	5	2	400.000.000	2	410.000.000	2	430.000.000	2	450.000.000	2	470.000.000	Pokja Fasilitasi Pengadaan Tanah	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan
Terlaksananya Reforma Agraria di Jawa Tengah **									1.200.000.000		1.246.000.000		1.286.000.000		1.352.000.000		1.399.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA **	%	100	100	22,2	1.200.000.000	27,7	1.246.000.000	33,3	1.286.000.000	38,8	1.352.000.000	44,4	1.399.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN ***							630.000.000		650.000.000		674.000.000		720.000.000		745.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan ***	%	100	100	100	630.000.000	100	650.000.000	100	674.000.000	100	720.000.000	100	745.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							630.000.000		650.000.000		674.000.000		720.000.000		745.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	Jumlah Dokumen Permasalahan Pertanahan yang Difasilitasi ****	Dokumen	3	1	1	630.000.000	1	650.000.000	1	674.000.000	1	720.000.000	1	745.000.000	Pokja Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	
	2.10.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****							330.000.000		340.000.000		350.000.000		370.000.000		385.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Terinventarisasinya Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****	Dokumen	N/A	2	1	330.000.000	1	340.000.000	1	350.000.000	1	370.000.000	1	385.000.000	Pokja Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan
	2.10.04.1.01.0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****							300.000.000		310.000.000		324.000.000		350.000.000		360.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****	Berita Acara	10	10	5	300.000.000	5	310.000.000	5	324.000.000	5	350.000.000	5	360.000.000	Pokja Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE ***							570.000.000		596.000.000		612.000.000		632.000.000		654.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Terfasilitasinya Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria ***	%	100	100	100	570.000.000	100	596.000.000	100	612.000.000	100	632.000.000	100	654.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							570.000.000		596.000.000		612.000.000		632.000.000		654.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Terlaksananya Penataan Akses Reforma Agraria	Jumlah Dokumen Penataan Akses Reforma Agraria ****	Dokumen	N/A	10	3	570.000.000	3	596.000.000	3	612.000.000	3	632.000.000	3	654.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota *****							405.000.000		425.500.000		435.500.000		450.500.000		465.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. *****	Berita Acara	7	10	8	400.000.000	8	420.000.000	8	430.000.000	8	445.000.000	8	460.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan
			Terlaksananya Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Fasilitasi Koordinasi Penataan Akses Reforma Agraria *****	Berita Acara	N/A	2	2	5.000.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan
	2.10.06.1.01.0004	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi *****							165.000.000		170.500.000		176.500.000		181.500.000		188.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan	
			Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi *****	Laporan	2	22	4	160.000.000	4	165.000.000	4	171.000.000	4	176.000.000	4	183.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan
			Terlaksananya Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kanwil BPN Provinsi dalam Pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah	Jumlah Berita Acara dalam rangka Fasilitasi Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria *****	Berita Acara	N/A	N/A	2	5.000.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH- Bidang Pertanahan

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman *									21.022.812.000		22.463.480.000		24.055.700.000		25.006.070.000		26.149.597.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman *	Angka	78	78	79		80		81		82		83		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **									990.000.000		1.105.000.000		1.150.000.000		1.165.000.000		1.210.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **	Angka	3,03	3,04	3,06	990.000.000	3,08	1.105.000.000	3,1	1.150.000.000	3,12	1.165.000.000	3,14	1.210.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							990.000.000		1.105.000.000		1.150.000.000		1.165.000.000		1.210.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ***	%	108,08	100	100	990.000.000	100	1.105.000.000	100	1.150.000.000	100	1.165.000.000	100	1.210.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****							990.000.000		1.105.000.000		1.150.000.000		1.165.000.000		1.210.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	20	990.000.000	40	1.105.000.000	60	1.150.000.000	80	1.165.000.000	100	1.210.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							515.000.000		550.000.000		580.000.000		590.000.000		620.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	9	7	7	515.000.000	7	550.000.000	7	580.000.000	7	590.000.000	7	620.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							425.000.000		485.000.000		500.000.000		505.000.000		520.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	11	9	9	425.000.000	9	485.000.000	9	500.000.000	9	505.000.000	9	520.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							25.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	2	25.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							25.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terselenggarana ya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **									20.032.812.000		21.358.480.000		22.905.700.000		23.841.070.000		24.939.597.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman **	Angka	90,5	91,5	91,6	20.032.812.000	91,7	21.358.480.000	91,8	22.905.700.000	91,9	23.841.070.000	92	24.939.597.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							20.032.812.000		21.358.480.000		22.905.700.000		23.841.070.000		24.939.597.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ***	%	119,5	100	100	20.032.812.000	100	21.358.480.000	100	22.905.700.000	100	23.841.070.000	100	24.939.597.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							15.335.812.000		16.040.500.000		16.641.500.000		17.286.500.000		18.128.700.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	6	6	6	15.335.812.000	6	16.040.500.000	6	16.641.500.000	6	17.286.500.000	6	18.128.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							14.800.812.000		15.500.000.000		16.100.000.000		16.744.000.000		17.581.200.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	79	87	87	14.800.812.000	87	15.500.000.000	87	16.100.000.000	87	16.744.000.000	87	17.581.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	12	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****							5.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	1	1	1	5.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							25.000.000		28.000.000		29.000.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD *****	Laporan	12	12	12	25.000.000	12	28.000.000	12	29.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****							185.000.000		190.000.000		195.000.000		200.000.000		205.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	4	185.000.000	4	190.000.000	4	195.000.000	4	200.000.000	4	205.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	X.XX.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Dokumen	2	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							160.000.000		165.000.000		170.000.000		175.000.000		180.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Dokumen	1	1	1	160.000.000	1	165.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Laporan	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Dokumen	2	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							110.000.000		120.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	110.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	78	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian *****	Dokumen	2	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai *****	Dokumen	2	2	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							50.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan *****	Orang	175	50	50	50.000.000	50	55.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****							10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan *****	Orang	140	130	79	10.000.000	79	15.000.000	79	15.000.000	79	15.000.000	79	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan *****	Orang	83	80	79	10.000.000	79	10.000.000	79	10.000.000	79	10.000.000	79	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							1.892.000.000		1.945.000.000		1.986.000.000		2.015.500.000		2.053.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	1.892.000.000	100	1.945.000.000	100	1.986.000.000	100	2.015.500.000	100	2.053.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor *****							50.000.000		55.000.000		60.000.000		62.500.000		65.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan *****	Paket	12	12	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	62.500.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							50.000.000		55.000.000		56.000.000		58.000.000		68.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan *****	Paket	12	12	12	50.000.000	12	55.000.000	12	56.000.000	12	58.000.000	12	68.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan *****	Paket	12	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan *****	Paket	12	12	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan *****	Paket	12	12	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan *****	Dokumen	12	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							32.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		60.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu *****	Laporan	12	12	12	32.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							950.000.000		960.000.000		970.000.000		975.000.000		975.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah *****	Laporan	12	12	12	950.000.000	12	960.000.000	12	970.000.000	12	975.000.000	12	975.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah *****	Laporan	1	1	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							350.000.000		360.000.000		370.000.000		375.000.000		380.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah *****	Dokumen	12	12	12	350.000.000	12	360.000.000	12	370.000.000	12	375.000.000	12	380.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							100.000.000		447.980.000		1.233.200.000		879.070.000		1.112.897.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	100	16	6	100.000.000	20	447.980.000	21	1.233.200.000	27	879.070.000	27	1.112.897.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		600.000.000		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	600.000.000	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel *****							25.000.000		100.000.000		115.000.000		125.000.000		220.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan *****	Paket	36	N/A	2	25.000.000	10	100.000.000	10	115.000.000	15	125.000.000	15	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							75.000.000		347.980.000		518.200.000		754.070.000		892.897.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan *****	Unit	64	16	4	75.000.000	10	347.980.000	10	518.200.000	12	754.070.000	12	892.897.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							1.660.000.000		1.830.000.000		1.855.000.000		1.890.000.000		1.920.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	36	36	3	1.660.000.000	3	1.830.000.000	3	1.855.000.000	3	1.890.000.000	3	1.920.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							160.000.000		170.000.000		180.000.000		200.000.000		210.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat *****	Laporan	12	12	12	160.000.000	12	170.000.000	12	180.000.000	12	200.000.000	12	210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							450.000.000		460.000.000		475.000.000		490.000.000		510.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan *****	Laporan	12	12	12	450.000.000	12	460.000.000	12	475.000.000	12	490.000.000	12	510.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1.050.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan *****	Laporan	12	12	12	1.050.000.000	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							750.000.000		785.000.000		870.000.000		1.445.000.000		1.395.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	252	284	294	750.000.000	313	785.000.000	314	870.000.000	319	1.445.000.000	319	1.395.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							50.000.000		60.000.000		60.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya *****	Unit	2	2	2	50.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							230.000.000		240.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya *****	Unit	30	19	19	230.000.000	19	240.000.000	20	265.000.000	20	265.000.000	20	265.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel *****							20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara *****	Unit	20	56	56	20.000.000	75	25.000.000	75	25.000.000	75	30.000.000	75	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara *****	Unit	130	135	145	75.000.000	145	75.000.000	145	75.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							325.000.000		325.000.000		375.000.000		885.000.000		815.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Sat.	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	2	325.000.000	2	325.000.000	2	375.000.000	2	885.000.000	2	815.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi *****	Unit	70	72	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							50.000.000		60.000.000		70.000.000		85.000.000		90.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	70	50.000.000	70	60.000.000	70	70.000.000	70	85.000.000	70	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH-OPD Provinsi

Sumber : E-Planning Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Tabel 4.2.
Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2025-2029

No.	Program Daerah	Rencana Aktvitas Riil	*Output*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PP. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Verifikasi dan Validasi dalam rangka Penyiapan Database Rumah Layak Huni	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Tahun 2026 : 1 Laporan Tahun 2027 : 1 Laporan Tahun 2028 : 1 Laporan Tahun 2029 : 1 Laporan Tahun 2030 : 1 Laporan	Program : Program Kawasan Permukiman Kegiatan : Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	• BPS • BP3KP Jawa III, Kementerian PKP • BPBPK Jawa Tengah, Kementerian PU • Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota • Pemerintah Desa/ Kelurahan • CSR/ *stakeholder* terkait
		Penyiapan Data Intervensi Teknis Backlog Perumahan (Backlog Kelayakan dan Backlog Kepemilikan)	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi dan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi Tahun 2026 : 2 Dokumen Tahun 2027 : 2 Dokumen Tahun 2028 : 2 Dokumen Tahun 2029 : 2 Dokumen Tahun 2030 : 2 Dokumen	Program : Pengembangan Perumahan Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : • Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi • Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi	Bidang Perumahan	• BP3KP Jawa III, Kementerian PKP • Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota • Pemerintah Desa/ Kelurahan

No.	Program Daerah	Rencana Aktvitas Riil	*Output*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi Tahun 2026 : 17.000 Unit Tahun 2027 : 17.000 Unit Tahun 2028 : 17.000 Unit Tahun 2029 : 17.000 Unit Tahun 2030 : 17.000 Unit	Program : Pengembangan Perumahan Kegiatan : Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Bidang Perumahan	• BPKAD Prov. Jateng • BP3KP Jawa III, Kementerian PKP • CSR/ *stakeholder* terkait
		Pembangunan Rumah Sederhana Sehat	Terbangunnya Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi Masyarakat Tahun 2026 : 100 Unit Tahun 2027 : 115 Unit Tahun 2028 : 140 Unit Tahun 2029 : 125 Unit Tahun 2030 : 140 Unit	Program : Pengembangan Perumahan Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Bidang Perumahan	• BP3KP Jawa III, Kementerian PKP • Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota • Pemerintah Desa • CSR/ *stakeholder* terkait
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Tahun 2026 : 125 Unit Tahun 2027 : 120 Unit Tahun 2028 : 120 Unit Tahun 2029 : 145 Unit	Program : Pengembangan Perumahan Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Bidang Perumahan	• BP3KP Jawa III, Kementerian PKP • Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota • Pemerintah Desa

No.	Program Daerah	Rencana Aktvitas Riil	*Output*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Tahun 2030 : 145 Unit Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi (termasuk Rumah Apung) Tahun 2026 : 50 Unit Tahun 2027 : 50 Unit Tahun 2028 : 50 Unit Tahun 2029 : 60 Unit Tahun 2030 : 60 Unit	Sub Kegiatan : • Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana • Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		• CSR/ *stakeholder* terkait
		Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi Tahun 2026 : 100 Unit Tahun 2027 : 100 Unit Tahun 2028 : 100 Unit Tahun 2029 : 100 Unit Tahun 2030 : 125 Unit	Program : Pengembangan Perumahan Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Bidang Perumahan	• BP3KP Jawa III, Kementerian PKP • Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota • Pemerintah Desa • CSR/ *stakeholder* terkait
2	PA. Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir	• Pembangunan Rumah Apung beserta PSU-nya di Kota Pekalongan • Pembangunan Rumah Apung beserta PSU-nya di Kabupaten Demak	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi (Rumah Apung) Tahun 2026 : 10 Unit Tahun 2027 : 10 Unit Tahun 2028 : 10 Unit Tahun 2029 : 10 Unit Tahun 2030 : 10 Unit	Program : Pengembangan Perumahan Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Bidang Perumahan	• BP3KP Jawa III, Kementerian PKP • BPBPK Jawa Tengah, Kementerian PU • Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota • Pemerintah Desa

No.	Program Daerah	Rencana Aktvitas Riil	*Output*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• CSR/ *stakeholder* terkait
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman Tahun 2026 : 1 Lokasi Tahun 2027 : 1 Lokasi Tahun 2028 : 1 Lokasi Tahun 2029 : 1 Lokasi Tahun 2030 : 1 Lokasi	Program : Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman	• Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota • Pemerintah Desa
3	PT. Fasilitasi Rumah Susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta	Fasilitasi kerja sama penyelenggaraan Rumah Susun MBR di Provinsi Jawa Tengah	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi dan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi Tahun 2026 : 1 Dokumen Tahun 2027 : 1 Dokumen Tahun 2028 : 1 Dokumen Tahun 2029 : 1 Dokumen Tahun 2030 : 1 Dokumen	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Bidang Perumahan	• BP3KP Jawa III, Kementerian PKP • Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota • CSR/ *stakeholder* terkait

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan dalam Bab IV. Selain IKU yang berlaku bagi perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah, yang mengacu pada indikator program yang tercantum dalam Bab IV.

Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat secara rinci dalam Tabel dibawah: :

Tabel 4.3.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	%	31,76	4,94	9,88	14,82	19,76	24,70	29,64	29,64
2	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat	%	20,33	20,39	9,65	14,48	19,30	24,13	28,95	28,95
3	Persentase Kawasan Kumuh	%	36,4	39,42	37,34	35,27	33,19	31,12	29,04	29,04
4	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA	%	100	100	22,20	27,70	33,30	38,80	44,40	44,40
6	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	78	78	79	80	81	82	83	83

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

Tabel 4.4.
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	%	35,87	49,49	14,90	27,32	39,73	52,15	64,56	64,56

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan ketentuan normatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunan program dalam Renstra ini mengikuti struktur hierarkis yang terdapat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi acuan utama dalam perencanaan strategis dinas tersebut.

Secara normatif, dokumen Renstra ini telah dirancang untuk mencakup program atau rencana kerja selama dua tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Didalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini terdapat kajian strategis, penetapan kebijakan utama, serta proyeksi keuangan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan asumsi makro dan mikro.

Dokumen Renstra ini menguraikan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi makro dan mikro yang relevan. Kebijakan dan program yang dirancang dan diarahkan untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman yang telah diidentifikasi, antara lain pemenuhan SPM Perumahan Rakyat terkait dengan rehabilitasi dan pembangunan rumah untuk korban bencana dan relokasi program pemerintah, pengurangan rumah tidak layak huni dan backlog perumahan, peningkatan kualitas permukiman kumuh, penyediaan PSU Permukiman serta penguatan tata kelola pertanahan melalui penyelesaian sengketa dan pelaksanaan reforma agraria.

Selain itu, juga terdapat indikator keberhasilan telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Implementasi Renstra ini memerlukan komitmen yang kuat, kerja keras, dedikasi, loyalitas, dan integritas dari seluruh jajaran perangkat dinas. Pelaksanaan Renstra ini memerlukan adanya konsistensi data, definisi operasional dan formulasi perhitungan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat. Pendekatan partisipatif dan berbasis risiko menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program

Pelaksanaan Renstra ini menuntut komitmen penuh, integritas, dan profesionalisme seluruh jajaran Dinas, yang didukung oleh sistem pengendalian internal dan mekanisme monitoring serta evaluasi berkala. Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk mengukur capaian output dan outcome, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan, sehingga dapat diambil tindakan korektif secara tepat waktu. Penyesuaian Renstra dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan atau kondisi strategis yang signifikan.

Selain itu, pelaksanaan Renstra ini juga menekankan pentingnya penerapan perspektif gender dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan. Upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta pengelolaan pertanahan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik semata,

tetapi juga memperhatikan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan secara adil. Dengan demikian, Renstra ini berkomitmen untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan berpihak pada kelompok rentan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan pengelolaan pembangunan dan pengembangan pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Oermukiman, serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga mendukung terwujudnya "Masyarakat Jawa Tengah yang Maju, Berkeadilan, dan Berkelanjutan." Renstra ini juga berfungsi sebagai acuan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja) dan sebagai instrumen pengendalian kinerja untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Semarang, September 2025

POHON KINERJA
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

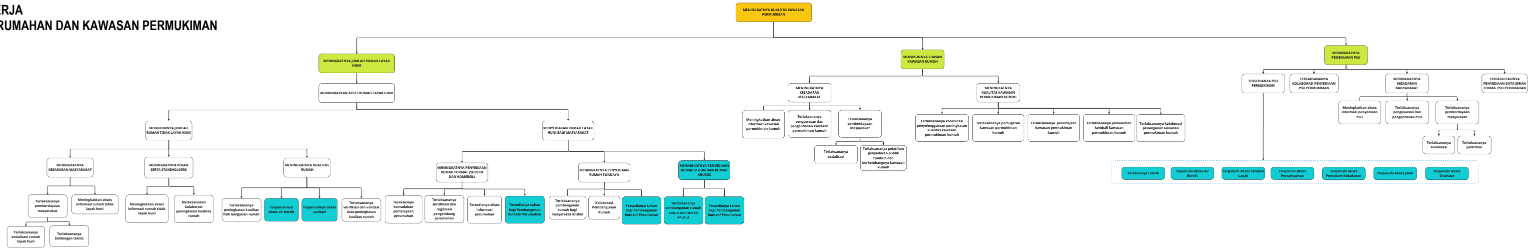

POHON KINERJA
URUSAN PERTANAHAN

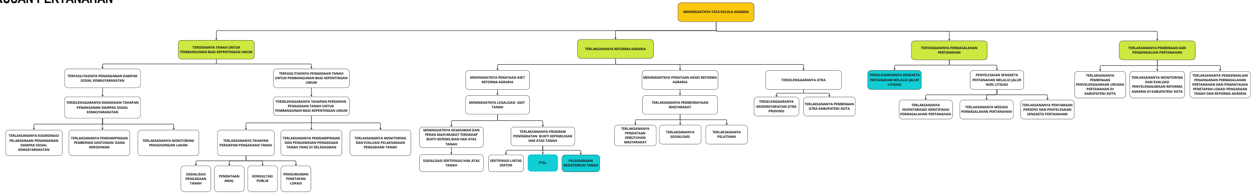

CASCADING RENSTRA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

| | | |

MATRIKS IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Konteks Risiko	Tujuan | Sasaran Strategis | Program | Kegiatan PD	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		Sumber Penyebab Eksternal/ Internal	C/UC	Pemilik Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Celah Pengendalian	Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian			Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu Penyelesaian
							Uraian	Pihak yang Terkena				Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum	Uraian	Memadai/ Belum		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko		
		Tujuan 1																					
	Risiko Strategis Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Agraria bagi Masyarakat	Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan	Terbatasnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan	Operasional	Adanya ketimpangan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan yang tidak terkoneksi pada sistem kawasan permukiman	Tidak semua masyarakat mendapatkan akses terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan	Masyarakat	Eksternal	UC	Kepala Disperakim Prov. Jateng	3,00	4,00	12 (Tinggi)	Ada	Memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	3,00	4,00	12 (Tinggi)	Melakukan pemantauan, pencegahan, dan penanganan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh secara kolaboratif dari berbagai sumber pembiayaan	TW I - TW IV
	Risiko Strategis Perangkat Daerah			Penetapan kembali/ baru SK Kumuh Kab/Kota oleh Bupati/ Walikota	Kebijakan	Kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang permukiman tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pertumbuhan luasan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat	Eksternal	UC	Kepala Disperakim Prov. Jateng	3,00	4,00	12 (Tinggi)	Ada	Melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	3,00	3,00	9 (Sedang)	Melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah secara terpadu dengan sektor terkait dari berbagai sumber pembiayaan	TW I - TW IV
	Risiko Strategis Perangkat Daerah		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Terbatasnya akses terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk masyarakat secara berkeadilan	Operasional	Masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memperoleh rumah yang layak huni	Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau	Masyarakat	Eksternal	UC	Kepala Disperakim Prov. Jateng	5,00	3,00	15 (Sangat Tinggi)	Ada	Memperluas akses terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk masyarakat secara berkeadilan	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	5,00	3,00	15 (Sangat Tinggi)	Melakukan penyediaan rumah yang layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk masyarakat secara berkeadilan dari berbagai sumber pembiayaan	TW I - TW IV
	Risiko Strategis Perangkat Daerah			Program penyediaan akses air minum dan sanitasi untuk pembangunan rumah di Provinsi Jawa Tengah belum optimal	Kebijakan	Masih belum terintegrasinya pembangunan rumah dengan penyediaan akses air minum dan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah	Pemenuhan rumah tidak sesuai dengan kriteria rumah layak huni yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian PUPR (ketahanan bangunan, luas per kapita, ketersediaan akses air minum dan sanitasi)	Masyarakat	Eksternal	UC	Kepala Disperakim Prov. Jateng	5,00	3,00	15 (Sangat Tinggi)	Ada	Mengintegrasikan penyediaan rumah dengan penyediaan jamban	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	5,00	3,00	15 (Sangat Tinggi)	Melakukan kolaborasi penyediaan rumah yang layak huni dengan Pemerintah Daerah maupun stakeholders terkait untuk memenuhi 4 kriteria rumah layak huni	TW I - TW IV
	Risiko Strategis Perangkat Daerah		Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pengadaan tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional/daerah maupun rencana strategis	Kebijakan	Dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemrakarsa tidak sesuai dengan perkembangan area yang menjadi obyek	Proses pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan	Pemrakarsa	Eksternal	UC	Kepala Disperakim Prov. Jateng	3,00	3,00	9 (Sedang)	Ada	Gubernur membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	3,00	3,00	9 (Sedang)	Meningkatkan koordinasi Tim Persiapan Pengadaan Tanah dalam setiap tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	TW I - TW IV
	Risiko Strategis Perangkat Daerah		Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	Terdapat ketimpangan penguasaan tanah dan penggunaan tanah, guna dimanfaatkan oleh masyarakat.	Operasional	Rendahnya sumber daya masyarakat terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimiliki	Tidak tersedianya akses penggunaan dan pemanfaatan tanah.	Masyarakat	Eksternal	UC	Kepala Disperakim Prov. Jateng	3,00	4,00	12 (Tinggi)	Ada	Integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi Reforma Agraria antara Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama K/L dan stakeholders terkait	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	3,00	4,00	12 (Tinggi)	Integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi Reforma Agraria antara Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama K/L dan stakeholders terkait	TW I - TW IV
		Sasaran 1.1																					
	Risiko Strategis Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh	Penetapan profil pembentukan kawasan kumuh Kab/Kota sebagai dasar besaran luasan dalam SK Kumuh Kab/Kota tidak sesuai	Kebijakan	Penggabungan/ pemisahan kawasan kumuh yang tidak sinkron antara Kab/ Kota dengan Provinsi dan Pusat	Delineasi luasan kawasan permukiman kumuh tidak jelas kewenangannya	Masyarakat	Eksternal	UC	Kepala Disperakim Prov. Jateng	3,00	4,00	12 (Tinggi)	Ada	Melakukan verifikasi dan penetapan luasan kawasan kumuh bersama dengan BPPW dan Kabupaten/Kota	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	3,00	3,00	9 (Sedang)	Menyusun berita acara penetapan luasan kawasan kumuh di akhir tahun sebagai dasar perubahan/ penetapan SK Kumuh Bupati/ Walikota	TW I - TW IV
		Sasaran 1.2																					
	Risiko Strategis Perangkat Daerah	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Pertumbuhan jumlah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Kebijakan	Masyarakat tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memperbaiki rumahnya atau berpindah ke lokasi tempat tinggal yang lebih layak dan aman	Masyarakat menempati rumah yang tidak layak huni dan/ atau pada lokasi yang tidak aman	Masyarakat	Eksternal	UC	Kepala Disperakim Prov. Jateng	5,00	3,00	15 (Sangat Tinggi)	Ada	Menyediakan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni maupun rumah terdampak bencana kepada masyarakat miskin (APBD Prov)	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	4,00	3,00	12 (Tinggi)	Menyediakan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni maupun rumah terdampak bencana kepada masyarakat miskin dari berbagai sumber pembiayaan (APBN, APBD Prov, Kab/Kota, CSR, BAZNAS, Swadaya,dll)	TW I - TW IV
	Risiko Strategis Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat	Kenaikan harga rumah yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin non bankable	Kebijakan	- Masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memperoleh rumah yang layak huni - Keterbatasan lahan untuk permukiman dengan harga yang meningkat cukup cepat setiap tahunnya	Masyarakat tidak memiliki rumah yang layak untuk ditinggali	Masyarakat	Eksternal	UC	Kepala Disperakim Prov. Jateng	5,00	3,00	15 (Sangat Tinggi)	Ada	Menyediakan bantuan pembangunan rumah baru bagi masyarakat miskin dan fasilitasi akses pembiayaan kredit mikro	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	4,00	3,00	12 (Tinggi)	Menyediakan bantuan pembangunan rumah baru bagi masyarakat miskin dan fasilitasi akses pembiayaan kredit mikro secara kolaboratif dengan stakeholder terkait dari berbagai sumber pembiayaan	TW I - TW IV
		Sasaran 1.3.																					
	Risiko Strategis Perangkat Daerah	Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Tidak adanya dukungan masyarakat terhadap penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum	Operasional	Informasi terkait dengan penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak tersampaikan dengan lengkap	Pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat terealisasi	Pemrakarsa kegiatan	Eksternal	UC	Kepala Disperakim Prov. Jateng	3,00	4,00	12 (Tinggi)	Ada	Koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi yang membutuhkan tanah, Kantor Pertanahan, APH serta stakeholder terkait dalam penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	3,00	4,00	12 (Tinggi)	Menginsentifkan koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi yang membutuhkan tanah, Kantor Pertanahan, APH serta stakeholder terkait dalam penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah	TW I - TW IV
	Risiko Strategis Perangkat Daerah			Tidak adanya kepastian hukum hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah terhadap penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Kebijakan	Kurangnya kesadaran dari pihak-pihak terkait terhadap tertib administrasi pertanahan	Pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat terealisasi	Pemrakarsa kegiatan	Eksternal	UC	Kepala Disperakim Prov. Jateng	3,00	3,00	9 (Sedang)	Ada	Menerapkan penyelenggaraan tahapan pengadaan tanah melalui fasilitasi, koordinasi, verifikasi, klarifikasi, dan validasi lapangan	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	3,00	3,00	9 (Sedang)	Menginsentifkan koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi yang membutuhkan tanah, Kantor Pertanahan, APH serta stakeholder terkait dalam penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah	TW I - TW IV
		Sasaran 1.4.																					

No	Konteks Risiko	Tujuan | Sasaran Strategis | Program | Kegiatan PD	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		Sumber Penyebab Eksternal/ Internal	C/UC	Pemilik Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Celah Pengendalian	Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian			Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu Penyelesaian
							Uraian	Pihak yang Terkena				Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum	Uraian	Memadai/ Belum		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko		
	Risiko Strategis Perangkat Daerah	Terlaksananya Reforma Agraria di Jawa Tengah	Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA	Sumber daya masyarakat sebagai obyek Penyelenggraan Reforma Agraria di Kabupaten/ Kota tidak sinkron dengan rencana kerja GTRA Provinsi	Kebijakan	Kurangnya relevansi Renja GTRA Kabupaten/Kota dengan Renja GTRA Provinsi	Penyelenggraaan Reforma Agraria tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan sumber daya masyarakat	Masyarakat	Eksternal	UC	Kepala Disperakim Prov. Jateng	3,00	3,00	9 (Sedang)	Ada	Penajaman Renja yang sinkron anatara GTRA Provinsi dengan Renja Kabupaten/Kota	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	3,00	3,00	9 (Sedang)	Optimasi implemantasi Renja GTRA Provinsi dalam penajaman program kegiatan Reforma Agraria pada GTRA Kabupaten/Kota sejalan dengan mekanime perencanaan pembangunan daerah.	TW I - TW IV
		Tujuan 2																					
	Risiko Strategis Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil rendah	Reputasi	-Rendahnya capaian kinerja Disperakim Prov.Jateng -Kurangnya data dukung dalam pemenuhan 8 (delapan) area perubahan	Penurunan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Disperakim Prov. Jateng	Internal	C	Kepala Disperakim Prov. Jateng	3,00	3,00	9 (Sedang)	Ada	Berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setda Prov.Jateng	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	3,00	3,00	9 (Sedang)	-Updating data dan kearsipan -Meningkatkan koordinasi dengan Biro Organisasi Setda Prov.Jateng	TW I-TW II
		Sasaran 2.1.																					
	Risiko Strategis Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Hasil Penjaminan Kualitas jauh lebih rendah dari Penilaian Mandiri Manajemen Risiko	Reputasi	- OPD belum memiliki karakteristik pendekatan Manajemen Risiko - OPD telah memiliki kebijakan terkait Manajemen Risiko namun belum dikomunikasikan, diimplementasikan dan belum menetapkan selera risiko - Tim Pengelolaan Risiko Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak memahami penerapan SPIP	Menurunnya karakteristik Level Kelompok Indeks Manajemen Risiko pada Disperakim Prov.Jateng	Disperakim Prov. Jateng	Internal	C	Kepala Disperakim Prov. Jateng	3,00	3,00	9 (Sedang)	Ada	Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Disperakim Prov.Jateng	Belum Memadai	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	3,00	3,00	9 (Sedang)	-Melaksanakan FGD Penyelenggaraan SPIP dan Maturitas SPIP lingkup Disperakim Prov.Jateng -Meningkatkan koordinasi dengan tim APIP sebagai Penjamin Kualitas -Melakukan updating data dan kearsipan	TW I- TW IV

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), dan menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk periode tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, seluruh perangkat daerah juga secara paralel menyusun dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan;
b. Penyusunan Rancangan Awal;
c. Penyusunan Rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan Rancangan Akhir
f. Penetapan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Tengah merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP berpedoman pada berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum, di antaranya:

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014**, yang dalam **Pasal 272** menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pemerintah daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
3. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017**, yang memberikan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan

daerah, termasuk Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, agar selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah.

Seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang, tantangan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Jawa Tengah semakin kompleks. Urbanisasi yang meningkat, konflik sosial, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih profesional dan humanis menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja Satpol PP.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kebijakan strategis nasional, sehingga dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.

Melalui Renstra ini, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, serta mewujudkan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga Jawa Tengah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 pada pasal 12 disebutkan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, kemudian pada pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam Lampiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban umum kewenangan Daerah Provinsi meliputi :

a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
b. Penegak kan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur
c. Pembinaan PPNS Provinsi.

Dalam perkembangannya, Satpol PP juga memiliki kewenangan penting dalam urusan sub urusan kebakaran, yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan dalam urusan kebakaran terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi memiliki peran koordinatif

dan pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat, termasuk pemadam kebakaran (damkar), di wilayah kabupaten/kota.

Adapun Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tantang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa:

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi mencakup Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi;
b. Mutu pelayanan dasar sub urusan trantribum meliputi :
    1. Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
    2. Standar sarana dan prasarana Satpol PP;
    3. Standar peningkapan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;

Dengan demikian, berdasarkan hal di atas dan untuk mengoptimalisaikan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib perlu disusun perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan. Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Jawa Tengah setiap tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peratutan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025–2029

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi dan program prioritas daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja Tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan urusan Trantibumlinmas tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) periode Tahun 2025-2029

b. Tujuan

Renstra Satpol PP Provinsi Jawa tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan :

a. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2025-2029;
b. Untuk mengintegrasikan program-program Satpol PP Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dalam rangka penyusunan program, serta menjamin konsistensi perencanaan dan komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Satpol PP.
c. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program-program/kegiatan serta akuntabillitasnya;
d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan tentang peran (tugas dan fungsi) Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2025-2029, mengulas pemetaan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran, strategi, serta arah kebijakan dalam rangka mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Tengah Periode tahun 2025-2029; Manajemen Resiko Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja (IKU, IKK, SPM), kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; indikator kinerja Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang secara langsung akan dicapai Satpol PP Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi dan peran dokumen Renstra yang telah ditetapkan, disertai pedoman transisi perencanaan pada periode berikutnya, berikut kaidah pelaksanaannya.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah mempunyai Fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan Bidang Penegakan Hukum Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Pelindungan Masyarakat, dan Bidang Penanganan Kebakaran;
b. pelaksanaan kebijakan Bidang Penegakan Hukum Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Pelindungan Masyarakat, dan Bidang Penanganan Kebakaran;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penegakan Hukum Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Pelindungan Masyarakat, dan Bidang Penanganan Kebakaran;
d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan SATPOL PP; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Sejalan dengan hal tersebut diatas Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peratutan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Satpol PP

   Memimpin Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi melaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan SATPOL PP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat melaksanakan fungsi:

1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan SATPOL PP;
2. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan SATPOL PP;
3. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan SATPOL PP;
4. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan SATPOL PP;
5. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan SATPOL PP;
7. penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan SATPOL PP; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Bidang Penegakan Hukum Daerah

Bidang Penegakan Hukum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum daerah dan pengendalian PPNS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan Hukum Daerah melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sosialisasi, penyuluhan, inventarisasi, pemetaan, penertiban non-yustisial, penindakan yustisial, penyelidikan, penyidikan, penindakan administratif pelanggaran, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, pengembangan kapasitas, karier, kesejahteraan, dan penyelenggaraan sekretariat PPNS, pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam

pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, serta pengkoordinasian penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosialisasi, penyuluhan, inventarisasi, pemetaan, penertiban non-yustisial, penindakan yustisial, penyelidikan, penyidikan, penindakan administratif pelanggaran, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, pengembangan kapasitas, karier, kesejahteraan, dan penyelenggaraan sekretariat PPNS, pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, serta pengkoordinasian penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang sosialisasi, penyuluhan, inventarisasi, pemetaan, penertiban non-yustisial, penindakan yustisial, penyelidikan, penyidikan, penindakan administratif pelanggaran, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, pengembangan kapasitas, karier, kesejahteraan, dan penyelenggaraan sekretariat PPNS, pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, serta pengkoordinasian penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang sosialisasi, penyuluhan, inventarisasi, pemetaan, penertiban non-yustisial, penindakan yustisial, penyelidikan, penyidikan, penindakan administratif pelanggaran, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, pengembangan kapasitas, karier, kesejahteraan, dan penyelenggaraan sekretariat PPNS, pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, serta pengkoordinasian penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
5. Pelaporan dan rekomendasi di bidang sosialisasi, penyuluhan, inventarisasi, pemetaan, penertiban non-yustisial, penindakan yustisial, penyelidikan, penyidikan, penindakan administratif pelanggaran, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, pengembangan

kapasitas, karier, kesejahteraan, dan penyelenggaraan sekretariat PPNS, pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, serta pengkoordinasian penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Penanganan Kebakaran :

Bidang Penanganan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Kebakaran melaksanakan fungsi:.

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan kebakaran, penyelenggaraan informasi dan pelaporan kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, koordinasi, pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana, kerjasama, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kebakaran;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kebakaran, penyelenggaraan informasi dan pelaporan kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, koordinasi, pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana, kerjasama, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kebakaran;
3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kebakaran, penyelenggaraan informasi dan pelaporan kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, koordinasi, pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana, kerjasama, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kebakaran;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penanganan kebakaran, penyelenggaraan informasi dan pelaporan kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, koordinasi, pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana, kerjasama, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kebakaran;
5. pelaporan dan rekomendasi di bidang penanganan kebakaran, penyelenggaraan informasi dan pelaporan kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, koordinasi, pembinaan,

fasilitasi sarana dan prasarana, kerjasama, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kebakaran; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan daerah rawan, deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta kerjasama;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan daerah rawan, deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta kerjasama;
3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan daerah rawan, deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta kerjasama;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemetaan daerah rawan, deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta kerjasama;
5. pelaporan dan rekomendasi di bidang pemetaan daerah rawan, deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, spenanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta kerjasama; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pelindungan Masyarakat

Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan masyarakat Bidang Pelindungan Masyarakat melaksanakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pemberdayaan, koordinasi, dan mobilisasi satuan tugas pelindungan masyarakat dan satuan pelindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pemberdayaan, koordinasi, dan mobilisasi satuan tugas pelindungan masyarakat dan satuan pelindungan masyarakat;
3. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pemberdayaan, koordinasi, dan mobilisasi satuan tugas pelindungan masyarakat dan satuan pelindungan masyarakat;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan, pemberdayaan, koordinasi, dan mobilisasi satuan tugas pelindungan masyarakat dan satuan pelindungan masyarakat;
5. pelaporan dan rekomendasi di bidang pembinaan, pemberdayaan, koordinasi, dan mobilisasi satuan tugas pelindungan masyarakat dan satuan pelindungan masyarakat; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya

a. Susunan Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol PP Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 memiliki personil sebanyak 82 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasar Golongan dan Jenis Kelamin :

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPPK	6	10	16
I	-	-	-
II	16	5	21
III	32	4	36
IV	8	1	9
Jumlah	62	20	82

2. Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yaitu :

a. Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin :

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	-	-	-
SLTP	1	-	1
SLTA	21	1	22
Sarmud/DIII	4	6	10
S1/ D IV	25	11	36
Strata 2	12	1	13
Jumlah	63	19	82

b. Pendidikan dan Latihan

Diklat	Jumlah
Diklat Pimpinan II	1
Diklat Pimpinan III	4
Diklat Pimpinan IV	6
Diklat PPNS	10
Diksar Pol PP	39

3. Pegawai Berdasarkan Usia :

Usia	Jumlah
< 20 – 35 Tahun	16
36 – 45 Tahun	26
> 45 Tahun	28
Jumlah	70

b. Sarana / Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Gedung Kantor			
1	Ruang Kerja Pimpinan dan staf	27 Ruang	27 Ruang	-
2	Ruang Pos Jaga	1 unit	1 unit	-
3	Ruang Rapat	3 unit	3 unit	-

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4	Ruang Layanan Pegaduan dan Pemeriksaan	1 unit	1 unit	-
	Gedung Kantor			
5	Ruang Penyimpanan Barang/Gudang	9 Ruang	9 Ruang	-
6	Ruang Sekretariat Penyidik PNS	1 unit	1 unit	-
7	Ruang Sidang Majelis Kode Etik	-	-	-
8	Tempat Apel/Upacara	2 tempat	2 tempat	-
5	Ruang Penyimpanan Barang/Gudang	9 Ruang	9 Ruang	-
6	Ruang Sekretariat Penyidik PNS	1 unit	1 unit	-
7	Ruang Sidang Majelis Kode Etik	-	-	-
8	Tempat Apel/Upacara	2 tempat	2 tempat	-
9	Halaman Parkir	5 tempat	5 tempat	-
	Kendaraan Operasional			
10	Sepeda Motor	8 unit	8 unit	-
11	Mobil Jenis Offroad/jeep	5 unit	4 unit	1 unit
12	Mini Bus	15 unit	13 unit	2 unit
13	Truck Kecil	-	-	-
14	Truck Sedang	-	-	-
15	Truck Besar	-	-	-
16	Jenis Kendaraan Pendukung lainnya	-	-	-
	Perlengkapan Operasional			
17	Pakaian Dinas	130 stel	130 stel	-
18	tonfa dan holster tonfa	30 buah	30 buah	-
19	borgol	-	-	-
20	tameng	26 buah	26 buah	-
21	senter	6 buah	6 buah	-
22	ferplas	-	-	-
23	tas atau ransel	2 buah	2 buah	-
24	sleeping bag	2 buah	2 buah	-
25	jaket	-	-	-
26	rompi/body protector	26 buah	26 buah	-
27	masker	4 buah	4 buah	-

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Satpol PP periode tahun 2020-2024 dapat dilihat dari rasio capaian kinerja pelayanan tiap kegiatan per tahun. Rasio capaian kinerja dilihat dari perbandingan realisasi capaian dengan target Renstra per tahun. Semakin tinggi rasionya maka kinerjanya semakin baik sebaliknya bila rasionya semakin rendah maka kinerja pelayanannya semakin kurang.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai dengan mendasarkan hasil penghitungan rasio capaian antara realisasi dan perencanaan target sebagai berikut :

- > 100 % = amat baik
- 85-100 % = baik
- 75-84 % = cukup
- < 74 % = kurang

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**2018-2023**																			
	TUJUAN																			
1	Persentase kab/kota yang kondusif	%				100	100	100	100	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
2	Persentase penanganan gangguan trantibum di jawa tengah	%				-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
	SASARAN																			
1	Persentase kab/kota yang kondusif	%				100	100	100	100	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
2	Persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat	%				-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
	PROGRAM																			
1	Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah	%				100	100	100	100	-	100	30,84	100	-	-	100	30,84	100	-	-

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan	%				-	-	100	100	-	-	-	100	100	-			100	100	-
3	Persentase Kab/Kota rawan tramtib yang kondusif	%				85	85	85	85	-	85	85	85	-	-	100	100	100	-	-
4	Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kab/ Kota di Jawa Tengah	%				-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
5	Persentase masyarakat yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas	%				11,03	11,26	11,82	12,16	-	2,03	5,07	-	-	-	18,4	45,02	-	-	-
6	Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum	%				-	-	19,71	13,51	-	-	-	23,42	13,85	-	-	-	118,82	102,51	-
7	Persentase anggota Satpol PP Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya	%				12,52	12,52	12,52	12,52	-	2,73	5,39	-	-	-	21,80	43,05	-	-	-

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	Persentase anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya	%				0,29	0,33	0,35	2,69	-	0,23	0,35	1,03	2,82	-	79,31	106,06	294,28	104,83	-
B	**2024-2026**																			
	TUJUAN																			
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka				-	-	-	-	72	-	-	-	-	77,72	-	-	-	-	107,94
	Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka				-	-	-	-	82	-	-	-	-	84,07	-	-	-	-	102,52
	SASARAN																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka				-	-	-	-	80	-	-	-	-	84	-	-	-	-	105
	Indeks Manajemen Risiko	Angka				-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100
	Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Angka				-	-	-	-	12,4	-	-	-	-	13,2	-	-	-	-	106,45
	Skor kinerja penegakan produk hukum daerah	Angka				-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	6,09	-	-	-	-	99,83
	PROGRAM																			

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	%				-	-	-	-	29,57	-	-	-	-	29,57	-	-	-	-	100
	Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	%				-	-	-	-	78,83	-	-	-	-	102,19	-	-	-	-	129,63
	Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	%				-	-	-	-	40,03	-	-	-	-	40,03	-	-	-	-	100

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase penegakan produk hukum daerah	%				-	-	-	-	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100

Dari tabel 2.1, menindaklanjuti terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga terdapat penyesuaian pada tujuan, sasaran, dan program dan indikator dan adanya evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah dari Kemenpan RB maka terdapat perubahan indikator tujuan, sasaran dan program yang mulai berlaku pada Tahun 2022-2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat indikator yang tidak dapat tercapai disebabkan karena ada beberapa sebab, antara lain :

Tahun 2020

1. Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah tercapai 30,84% dari target 100% atau dengan rasio 30,84%;
2. Persentase masyarakat yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas tercapai 2,03% dari target 11,03% atau dengan rasio 18,4%;
3. Persentase anggota Satpol PP Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya tercapai 2,73% dari target 12,52% atau dengan rasio 21,80%;
4. Persentase anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya tercapai 0,23% dari target 0,29% atau dengan rasio 79,31%;

Pada Tahun 2020 Pemerihtah Provinsi Jawa Tengah melakukan recofusing anggaran dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 yang menyebabkan target capaian kinerja tidak dapat tercapai.

Terdapat indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya 100 % yaitu indikator tujuan Persentase kab/kota yang kondusif dan indikator program Persentase Kab/Kota rawan tramtib yang kondusif.

Tahun 2021

1. Persentase masyarakat yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas tercapai 5,07% dari target 11,26% atau dengan rasio 45,02%;
2. Persentase anggota Satpol PP Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya tercapai 5,39% dari target 12,52% atau dengan rasio 43,05%;
3. Persentase anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya tercapai 0,23% dari target 0,29%;

Terdapat indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya 100 % yaitu indikator tujuan Persentase kab/kota yang kondusif, indikator program Persentase Kab/Kota rawan tramtib yang kondusif, Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah. Terdapat indikator kinerja yang

pencapaian kinerjanya lebih dari 100% yaitu indikator program Persentase anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya.

Tahun 2022

1. Persentase penanganan gangguan trantibum di jawa tengah tercapai 100% dari target 100% atau dengan rasio 100%;
2. persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat tercapai 100% dari target 100% atau dengan rasio 100%;
3. Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan tercapai 100% dari target 100% atau dengan rasio 100%;
4. Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kab/ Kota di Jawa Tengah tercapai 100% dari target 100% atau dengan rasio 100%;
5. Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum tercapai 23,42% dari target 19,71% atau dengan rasio 118,82%;
6. Persentase anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya tercapai 1,03% dari target 0,35% atau dengan rasio 294,28%.

Tahun 2023

1. Persentase penanganan gangguan trantibum di jawa tengah tercapai 100% dari target 100% atau dengan rasio 100%;
2. persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat tercapai 100% dari target 100% atau dengan rasio 100%;
3. Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan tercapai 100% dari target 100% atau dengan rasio 100%;
4. Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kab/ Kota di Jawa Tengah tercapai 100% dari target 100% atau dengan rasio 100%;
5. Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum tercapai 13,85% dari target 13,51% atau dengan rasio 102,51%;
6. Persentase anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya tercapai 2,82% dari target 2,69% atau dengan rasio 104,83%.

Tahun 2024

1. Indeks Reformasi Birokrasi tercapai 77,2 dari target 72 atau dengan rasio 107,2%;
2. Indeks Penyelenggaraan Trantibum tercapai 84,07 dari target 82 atau dengan rasio 100%;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai 84 dari target 80 atau dengan rasio 105%;

4. Indeks Manajemen Risiko tercapai 3 dari target 3 atau dengan rasio 100%;
5. Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tercapai 13,2 dari target 12,4 atau dengan rasio 106,45%;
6. Skor kinerja penegakan produk hukum daerah tercapai 6,09 dari target 6,1 atau dengan rasio 99,83%;
7. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tercapai 100% dari target 100% atau dengan rasio 100%;
8. Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah tercapai 100% dari target 100% atau dengan rasio 100%;
9. Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum tercapai 29,57% dari target 29,57% atau dengan rasio 100%;
10. Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah tercapai 102,19% dari target 78,83%atau dengan rasio 129,63%;
11. Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina tercapai 40,03% dari target 40,03% atau dengan rasio 100%;
12. Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran tercapai 100% dari target 100% atau dengan rasio 100%;
13. Persentase penegakan produk hukum daerah tercapai 80% dari target 80% atau dengan rasio 100%;

Pada Skor kinerja penegakan produk hukum daerah tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dikarenakan Satpol PP Provinsi belum pernah melakukan penindakan secara yustisial terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja baik adalah :

1. Lembaga Satuan Polisi pamong Praja telah mempunyai dasar hukum yang kuat meliputi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peratutan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Tersedianya sumber daya aparatur.

   Sumber daya aparatur yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan akan sangat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

3. Pemanfaatan Teknologi dalam rangka pemenuhan target indikator dalam bentuk daring.

Sedangkan untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja realisasi pendanaan dipergunakan interval nilai dengan mendasarkan hasil penghitungan rasio capaian antara realisasi dan pagu anggaran sebagai berikut :

- 95- 100 % = amat baik
- 90-94,9 % = baik
- 85-89,9 % = cukup
- < 85 % = kurang

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Uraian	Pagu Indikatif Renstra (Rp.000)					APBD Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PENDAPATAN	520,000	409,000	410,000	500,000	393.000	422,365	412,727	477,000	514.000	393.000	466,713	412,837	482,257	518.112	410.578	110.50	100.03	101.10	100.8	104.47		
BELANJA	28,238,000	31,660,000	33,390,000	56,965,000	28.259.860	25,511,236	18,535,991	16,353,211	23.565.485	23.428.903	24,182,270	18,265,728	16,137,557	22.584.152	22.828.067	94.79	98.54	98.68	95,84	97,44		
PEMBIAYAAN	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-

Dari tabel 2.2 tersebut di atas rasio antara realisasi dan anggaran dapat dilihat dievaluasi sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2020 rasio antara realisasi dan anggaran belanja dibawah 95% atau masuk kategori kurang baik dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid- 19, sehingga kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dhentikan untuk mengendalikan penyebaran virus agar tidak meluas;
2. Pada Tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran semuanya diatas 95% atau kategori BAIK.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan pada Satpol PP Provinsi Jawa Tengah berkategori BAIK antara lain adalah :

1. Tersedianya sumber daya aparatur.
   Sumber daya aparatur yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan akan sangat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Realisasi serapan anggaran program/kegiatan selalu dimonitor dan di koordinasikan penyelesaiannya bilamana ada hambatan-hambatan dalam realisasinya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan APBD yang dilaksanakan setiap bulan.

2.4. Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan dalam pasal 255 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarkan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Tugas Satpol PP adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Upaya untuk mewujudkan masyarakat tertib dan tentram akan dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah melalui serangkaian program dan kegiatan. Berdasarkan hasil pemetaan terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Adapun identifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Banyaknya potensi gangguan Trantibum di Jawa Tengah	Masih tingginya pelanggaran Produk Hukum Daerah	Masih banyaknya pelanggaran terhadap produk hukum daerah
			Rendahnya intensitas penindakan pelanggar Prokumda
			Terbatasnya kualitas dan kuantitas PPNS
			Kurangnya sosialisasi Prokumda
			Kurangnya pembinaan terhadap pelanggar Prokumda
			Terbatasnya personil penindakan prokumda
			Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Prokumda
		Belum optimalnya penyelenggaraan Trantibum dan Linmas	Kurangnya penanganan Trantibum
			Kurangnya pembinaan Linmas
			Kurangnya patroli lintas kab/kota
			Kurangnya data potensi daerah rawan Trantibum
			Masih kurangnya kapasitas/kualitas SDM Satpol PP
		Belum optimalnya penanganan kebakaran di wilayah provinsi	Lemahnya integrasi data dan informasi kejadian kebakaran lintas wilayah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya pelatihan dan pembinaan petugas damkar
			Belum terbangunnya sistem koordinasi terpadu antar daerah
			Belum optimalnya edukasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidaknyamanan lingkungan. Beragam tuntutan yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang terjadi. Dalam konteks ini menegaskan adanya permasalahan dalam pelayanan urusan ini oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal. Adapun permasalahan pelayanan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan faktor- faktor yang mempengaruhinya dapat dipaparkan sebagai berikut.

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan pada Satpol PP Provinsi Jawa adalah :

1. Faktor Pendorong :
   a. Tingkat pendidikan anggota Satpol PP cukup memadai.
      Jumlah PNS dan PPPK Satpol PP Provinsi Jawa Tengah sebanyak 82 orang terdiri dari 13 orang berpendidikan S2, 36 orang berpendidikan S1, 10 orang berpendidikan D3, 22 orang berpendidikan SLTA, dan 1 orang

berpendidikan SLTP. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan anggota Satpol PP Prov. Jateng cukup memadai dengan jumlah S1 dan S2 sebanyak 59,75 %.

b. Sinergitas dengan instansi terkait dan Satpol PP Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam penegakkan Peraturan Daerah, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satpol PP Provinsi Jawa tengah selalu bekerja sama dan mendapat dukungan dari instansi terkait baik dari Unsur Polri, TNI, instansi terkait maupun Satpol PP kabupaten/kota di Jawa Tengah.

c. Kelembagaan dan tupoksi Satpol PP yang kuat.

Kelembagaan Satpol PP keberadaannya sangat kuat dibanding instansi lain karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama pada pasal 255 dan pasal 256 yang di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikuatkan dengan Peratutan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Faktor Penghambat :

a. Jumlah anggota Satpol PP semakin berkurang

Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pensiun, mutasi, dan keterbatasan rekrutmen pegawai baru yang tidak sebanding dengan jumlah personel yang keluar.

Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat tugas dan fungsi Satpol PP semakin kompleks, termasuk dalam bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penanganan kebakaran dan bencana non-alam. Penurunan jumlah personel berdampak langsung terhadap kapasitas operasional di lapangan, seperti:

- Terbatasnya kemampuan untuk melakukan patroli lintas kabupaten/kota,
- Kurangnya dukungan personel dalam kegiatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah,
- Tidak optimalnya penanganan gangguan ketertiban dan penanggulangan kebakaran,
- Meningkatnya beban kerja individu yang tersisa.

Jika tidak segera diantisipasi melalui kebijakan penguatan kelembagaan dan penambahan sumber daya manusia, kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target kinerja Satpol PP Provinsi dalam mendukung terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Jawa Tengah.

b. Masih banyak anggota Satpol PP yang belum mempunyai kualitas standart.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di bidang penegakan hukum daerah, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Kondisi ini berdampak pada:

- Kurangnya pemahaman sebagian anggota terhadap tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Satpol PP,
- Tidak optimalnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan Trantibumlinmas,
- Rendahnya kesiapsiagaan dalam penanganan gangguan ketertiban, termasuk dalam situasi darurat seperti kebakaran,
- Kesenjangan kompetensi antar personel yang menghambat kinerja tim secara keseluruhan.

c. Masih banyaknya pelanggaran produk hukum daerah

Masih maraknya pelanggaran terhadap produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur). Pelanggaran tersebut terjadi baik oleh individu, kelompok, maupun pelaku usaha, dan mencakup berbagai aspek, seperti:

- Ketidakpatuhan terhadap aturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- Pelanggaran izin usaha, penggunaan ruang publik, dan kawasan larangan,
- Aktivitas yang menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan masyarakat dan lingkungan,
- Pelanggaran terhadap kebijakan perlindungan masyarakat.

Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah masih rendah, serta menunjukkan bahwa fungsi penegakan hukum belum berjalan secara optimal.

Beberapa akar permasalahan yang memicu tingginya pelanggaran Prokumda di antaranya:

- Rendahnya intensitas penindakan terhadap pelanggaran, baik karena keterbatasan personel maupun sarana operasional;
- Terbatasnya jumlah dan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP Provinsi;

- Kurangnya sosialisasi produk hukum daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- Minimnya pembinaan terhadap pelanggar, sehingga tidak menimbulkan efek jera;
- Lemahnya koordinasi antara Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota dalam pengawasan lintas wilayah;
- Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pelayanan pemerintahan.

Permasalahan ini menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, berpotensi menghambat investasi, serta mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola wilayah yang tertib, aman, dan kondusif.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa:

- Penguatan peran Satpol PP dalam penegakan Perda;
- Peningkatan kapasitas PPNS;
- Sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengawasanp;
- Serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi hukum.

d. Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Tingginya frekuensi dan intensitas gangguan Trantibum tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian belum berjalan optimal, khususnya dalam hal pencegahan dini, patroli wilayah, serta penindakan terhadap pelanggaran.

Beberapa faktor penyebab yang berkontribusi terhadap permasalahan ini antara lain:

- Terbatasnya jumlah personel Satpol PP Provinsi, yang berdampak pada tidak optimalnya patroli wilayah dan respons cepat;
- Belum meratanya koordinasi lintas sektor dan lintas kabupaten/kota, terutama dalam penanganan kejadian Trantibum yang bersifat lintas wilayah;
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umu;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam deteksi dini gangguan Trantibum;
- Kurangnya data dan pemetaan daerah rawan gangguan Trantibum;
- Minimnya kegiatan edukasi, pembinaan, dan penyuluhan terhadap kelompok rentan pelanggaran, seperti remaja dan pelaku usaha informal.

Kondisi ini memengaruhi stabilitas sosial, kenyamanan masyarakat, dan citra pemerintah daerah, serta dapat menjadi hambatan bagi masuknya investasi dan pembangunan daerah.

Dalam konteks tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi, perlu adanya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas dan kuantitas personel, serta sinergi yang lebih efektif dengan pemerintah kabupaten/kota dan unsur keamanan lainnya, agar penanganan gangguan Trantibum dapat dilakukan secara komprehensif, cepat, dan berkelanjutan.

e. Masih rendahnya kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas dan Damkar.

Dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam penegakan peraturan daerah, tetapi juga dalam melakukan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta penguatan fungsi pemadam kebakaran (Damkar) di tingkat provinsi.

Namun demikian, hingga saat ini kemampuan dan kapasitas anggota Satlinmas dan petugas Damkar di berbagai daerah masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari:

- Terbatasnya pelatihan teknis dan fungsional yang diberikan kepada anggota Satlinmas;
- Minimnya jumlah anggota Damkar yang memiliki sertifikasi kompetensi resmi;
- Belum meratanya pelaksanaan pendidikan dasar, pelatihan mitigasi, dan simulasi penanggulangan bencana/kebakaran;
- Lemahnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan masyarakat.

Permasalahan ini berdampak pada:

- Kurangnya kesiapsiagaan anggota Satlinmas dalam mendukung penanggulangan bencana dan menjaga ketertiban saat kegiatan Masyarakat;
- Tidak optimalnya respons cepat dan efektif dalam menangani kejadian kebakaran, khususnya di wilayah perbatasan atau lintas kabupaten/kota;
- Tingginya risiko keselamatan personel di lapangan akibat minimnya pelatihan teknis dan peralatan pendukung;
- Lemahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan dan pencegahan kebakaran.

Faktor-faktor penyebab rendahnya kapasitas anggota Satlinmas dan Damkar di antaranya:

- Terbatasnya anggaran untuk pelatihan dan pembinaan berkelanjutan,;
- Belum terintegrasinya data dan sistem pembinaan SDM Satlinmas

dan Damkar secara provinsi;

- Kurangnya standar kompetensi yang dijadikan acuan dalam rekrutmen dan pengembangan SDM;
- Minimnya pemanfaatan teknologi dan metode pelatihan berbasis simulasi atau digital;
- Belum optimalnya sinergi dengan lembaga pelatihan teknis seperti BNPB, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga sertifikasi terkait.

Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan daerah, mengingat peran strategis Satlinmas dan Damkar sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat, khususnya dalam konteks penanggulangan bencana, konflik sosial, serta kebakaran permukiman, lahan, dan kawasan strategis provinsi.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM Satlinmas dan Damkar harus menjadi salah satu fokus dalam kebijakan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2025–2029, melalui pendekatan pelatihan terpadu, peningkatan anggaran pembinaan, serta kolaborasi antar pemerintah daerah dan mitra strategis.

Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Tengah dapat dianalisis dengan mengaitkan arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang dapat diidentifikasi:

1. Masih terdapat kesenjangan atau disharmonisasi antara Renstra Kemendagri dan Renstra Kabupaten/Kota terkait fungsi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. Perlu penyelarasan program dan kegiatan Satpol PP agar selaras dengan indikator dan target nasional maupun daerah;
3. Belum meratanya kualitas dan kuantitas personel Satpol PP di kabupaten/kota;
4. Keterbatasan anggaran operasional dan infrastruktur pendukung;
5. Satpol PP dituntut untuk lebih humanis dan responsif dalam menjalankan fungsinya, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada Masyarakat;
6. Perlu peningkatan kemampuan komunikasi publik dan pendekatan sosial budaya;
7. Banyaknya Perda dan Perkada yang harus ditegakkan dengan situasi sosial yang kompleks dan dinamis;

8. Banyaknya Perda dan Perkada yang harus ditegakkan dengan situasi sosial yang kompleks dan dinamis;
9. Perlunya sinergi dengan OPD lain dan aparat penegak hukum untuk mendukung efektivitas penegakan;
10. Masih terbatasnya integrasi teknologi informasi dalam pengawasan, pelaporan kejadian, dan respons cepat terhadap aduan masyarakat;
11. Rendahnya pemanfaatan sistem informasi berbasis data untuk pengambilan kebijakan dan pengukuran kinerja;
12. Kabupaten/kota di Jawa Tengah harus menyesuaikan indikator kinerja Satpol PP dengan target provinsi.
13. Fasilitasi Linmas pada PAM pileg, pilkada dan pilpres

TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS).

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Secara substansi pelayanan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tidak terkait dengan RTRW.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian terhadap dokumen KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satpol PP yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satpol PP di bidang penegakkan Perda dalam kegiatannya selama lima tahun ke depan akan melaksanakan penegakkan terhadap Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.

TELAAH MASUKAN STAKEHOLDER

Berdasarkan hasil masukan dari stakeholder pada proses penyusunan Rentsra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, antara lain:

a. Fokus Penegakan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

   Satpol PP perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian target PAD melalui penegakan Perda terkait pajak dan retribusi daerah, khususnya setelah diberlakukannya Perda No. 12 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, karena Satpol PP dipandang sebagai aktor penting dalam penertiban wajib pajak dan objek retribusi, serta pengawasan terhadap praktik ilegal yang menghambat potensi pendapatan daerah;

b. Prioritas pada Penegakan Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.

   Penegakan Perda ini dinilai strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan penerimaan dari pajak air tanah, terutama di kawasan industri dan perkotaan. Satpol PP Provinsi lebih aktif dalam menindak perusahaan atau pihak yang melakukan pengambilan air tanah secara ilegal atau melebihi izin. Satpol PP perlu bersinergi dengan Dinas ESDM dan dinas teknis lainnya untuk melaksanakan pengawasan lapangan yang efektif dan berbasis data.

c. Penguatan Kelembagaan dan Sistem

   Pemanfaatan teknologi informasi dan e-governance, seperti sistem pelaporan pelanggaran retribusi secara digital, dashboard pengawasan berbasis lokasi, dan integrasi data antar OPD.

TELAAH ISU STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 2.4

Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	**Permasalah Perangkat Daerah**	**Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah**	**Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah**			**Isu Strategis Perangkat Daerah**
			Global	**Nasional**	**Regional**	
1. Penegakan Perda dan Perkada; 2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 3. Perlindungan Masyarakat	1. Masih tingginya pelanggaran Produk hukum Daerah; 2. Belum optimalnya penyelenggaraan Trantibum dan Linmas	1. Belum Optimalnya TataKelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi; 2. Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Isu tata kelola pemerintahan: 1. Pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas.	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis; 2. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	1. Kualitas dan kuantitas PPNS, anggota Satpol PP, Linmas dan Damkar; 2. Penanganan pelanggaran terhadap hukum daerah; 3. Kesadaran Masyarakat terhadap Tibumtranmas;

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalah Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
						4. Pemberdayaan Masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat; 5. Sarpras Satpol PP, Linmas dan Damkar

Dengan melihat faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri, Sasaran jangka menengah Renstra, implikasi RTRW dan KLHS dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Kualitas dan kuantitas PPNS, anggota Satpol PP, Linmas dan Damkar ;

   Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, khususnya yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perlindungan Masyarakat (Linmas), serta personel Pemadam Kebakaran (Damkar). Dari sisi kuantitas, jumlah personel yang tersedia saat ini belum sebanding dengan beban kerja, luas wilayah, serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi di lapangan. Banyak daerah masih mengalami kekurangan tenaga operasional, baik dalam pengawasan perda dan perkada (untuk PPNS dan Satpol PP), pelibatan dalam kegiatan pengamanan dan penertiban (oleh Linmas), maupun dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (oleh Damkar). Hal ini berdampak pada keterbatasan jangkauan layanan dan respon yang kurang optimal terhadap insiden atau pelanggaran yang terjadi.

   Dari sisi kualitas, sebagian besar aparatur masih memerlukan peningkatan kompetensi teknis dan soft skills. Terbatasnya pelatihan berkelanjutan, belum meratanya sertifikasi keahlian, dan minimnya akses terhadap pengembangan kapasitas menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum daerah, perlindungan masyarakat, serta kesiapsiagaan dan kecepatan dalam merespons kebakaran dan bencana lainnya masih belum maksimal.

Hal-hal yang perlu dilakukan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yaitu

1. Peningkatan jumlah personel melalui rekrutmen berbasis kebutuhan riil dan analisis beban kerja.
2. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan, serta sertifikasi profesi.
3. Peningkatan insentif dan kesejahteraan untuk mendorong motivasi dan loyalitas personel.
4. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk mendukung efektivitas kerja, khususnya dalam sistem pelaporan, pemantauan, dan respons terhadap aduan.

b. Penanganan pelanggaran terhadap hukum daerah;

Pelanggaran terhadap hukum daerah, yang mencakup peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada), merupakan isu strategis yang secara langsung menghambat terciptanya ketertiban umum, kepastian hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. Fenomena ini mencerminkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah.

Tingginya angka pelanggaran disebabkan oleh berbagai faktor. Dari sisi masyarakat, masih banyak yang tidak mengetahui, memahami, atau bahkan mengabaikan keberadaan hukum daerah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai perda dan perkada turut berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, penegakan hukum daerah belum berjalan optimal karena keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum daerah, seperti PPNS dan Satpol PP. Selain itu, belum adanya sistem pengawasan yang terintegrasi serta lemahnya koordinasi antara perangkat daerah dan aparat penegak hukum turut memperburuk efektivitas pengawasan dan penindakan.

Pelanggaran yang sering terjadi meliputi perizinan usaha yang tidak sesuai ketentuan, pelanggaran ketertiban umum, penggunaan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, retribusi serta pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Jika tidak segera diatasi, pelanggaran ini berpotensi merugikan pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan ketidakadilan hukum, dan menurunkan wibawa pemerintah daerah. Maka perlu adanya langkah-langkah berupa Penguatan Kapasitas Penegak Hukum Daerah, Penyusunan Prosedur Penindakan yang Jelas dan Terstandar, Optimalisasi Peran Teknologi Informasi, Peningkatan Sinergi Antar-OPD dan Lembaga Terkait, Pendekatan Persuasif dan Partisipatif.

c. Kesadaran Masyarakat terhadap Tibumtranmas;

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Tibumtranmas) masih menjadi tantangan strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan kondusif. Kondisi ini ditandai dengan masih seringnya terjadi pelanggaran di ruang publik, seperti parkir sembarangan, aktivitas usaha tanpa izin, serta berbagai bentuk perilaku lain yang mengganggu kenyamanan dan keamanan bersama.

Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan pentingnya ketertiban umum sebagai bagian dari kehidupan bersama. Edukasi hukum yang terbatas, tidak meratanya informasi, serta lemahnya peran tokoh masyarakat dan lembaga lokal dalam membangun budaya tertib turut memperparah keadaan.

Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Tibumtranmas, akan tercipta ekosistem sosial yang lebih aman, tertib, dan tangguh, sebagai fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

d. Pemberdayaan Masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat;

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek strategis dalam membangun ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan sosial. Namun, pada kenyataannya, peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi sosial yang aman dan kondusif masih belum optimal. Masyarakat sering kali bersifat pasif terhadap isu-isu ketertiban dan keamanan, serta kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ketenteraman di tingkat lokal. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya soal pelibatan secara fisik, melainkan juga mencakup peningkatan kapasitas, kesadaran hukum, dan pembentukan perilaku warga yang proaktif dalam menjaga lingkungan sosial.

Dengan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan menyeluruh, suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi menjadi hasil dari kerja sama antara warga dan aparatur dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan aman.

e. Sarpras Satpol PP, Linmas dan Damkar.

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung efektivitas tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP), Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan Pemadam Kebakaran (Damkar). Namun, hingga saat ini, keterbatasan sarpras masih menjadi salah satu isu strategis yang menghambat optimalisasi pelayanan dan respons cepat terhadap berbagai bentuk gangguan ketertiban umum, bencana, maupun situasi darurat.

Kekurangan ini berdampak pada lambatnya respons terhadap kejadian, menurunnya profesionalitas aparatur, dan tingginya risiko keselamatan personel saat bertugas. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan publik secara menyeluruh.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya akan meningkatkan efektivitas operasional Satpol PP, Linmas, dan Damkar, tetapi juga menjadi indikator penting komitmen pemerintah daerah dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 disusun guna mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2029 dengan filosofi **"Ngopeni. Nglakoni. Jateng"**. Ngopeni-Nglakoni Jateng menjadi Perwujudan Semangat Pimpinan Daerah yang menginspirasi pada seluruh Penyelenggara Pemerintahan untuk RESPONSIF, PEDULI mencurahkan perhatiannya untuk memelihara dan merawat, dan tidak segan melakukan tindakan POSITIF sebagai perwujudan komitmen dan tanggung jawab untuk Jawa Tengah Maju, Berwibawa dan Berkelanjutan dengan Semangat Kolaboratif dan Responsif.

Dengan landasan filosofis tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

"**JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045"**

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

1) Tujuan Perangkat Daerah

a) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Salah satu tujuan utama yang diemban tahun 2025-2029 adalah **meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**, yang merupakan fondasi bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan dalam rangka mendukung misi daerah "*Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan,".*

Upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan melalui penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah secara tegas namun humanis. Satpol PP hadir di tengah masyarakat untuk mencegah dan menangani gangguan-gangguan ketertiban, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dengan mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif, Satpol PP bertugas untuk menegakkan norma-norma yang berlaku, sekaligus mendorong kesadaran hukum dan disiplin warga.

Melalui kehadiran dan kinerja Satpol PP yang responsif dan profesional, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari ketertiban ruang publik, keamanan lingkungan, serta ketentraman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, tujuan ini tidak hanya menjadi tugas kelembagaan, tetapi juga komitmen bersama untuk menciptakan kehidupan sosial yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks Penyelenggaraan Trantibum

b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi organisasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Tujuan **"Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah"** menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik dalam rangka mendukung misi daerah " Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas".

Sebagai bagian dari perangkat daerah yang berperan dalam penegakan peraturan dan kebijakan pemerintah, Satpol PP menjadi ujung tombak dalam menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, kolaborasi dengan instansi terkait, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, Satpol PP turut membangun tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan adaptif.

Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Sasaran Perangkat Daerah

a) Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi memiliki peran penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah dapat dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan berkeadilan. Oleh karena itu, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah **"Meningkatnya kualitas penegakan produk hukum daerah".** Peningkatan kualitas ini mencakup tidak hanya aspek kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, kejelasan prosedur penegakan, serta pendekatan yang humanis dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Satpol PP untuk menjadi institusi yang tidak hanya kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat karena konsistensi, keadilan, dan integritas dalam setiap tindakannya.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja Skor kinerja Penegakan Produk Hukum Daerah.

b) Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan dan memelihara suasana kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram. Melalui sasaran strategis **"Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,"** Satpol PP berkomitmen untuk terus hadir secara aktif dan adaptif dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah provinsi. Upaya pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman ini dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan, pencegahan, penertiban, serta penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, edukatif, dan dialogis, Satpol

PP mendorong terciptanya kesadaran hukum di tengah masyarakat serta menjalin kemitraan yang konstruktif antara pemerintah dan warga.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja Skor kinerja penyelenggaraan tibumtranmas.

c) Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Sasaran strategis **"Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah"** mencerminkan komitmen Satpol PP untuk meminimalkan potensi hambatan dan gangguan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Melalui sasaran ini, Satpol PP tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan di lapangan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko.

d) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi menetapkan sasaran strategis **"Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah."** Sasaran ini mencerminkan komitmen Satpol PP untuk terus meningkatkan mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan tercapainya peningkatan kualitas pelayanan, Satpol PP diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung terwujudnya perangkat daerah yang profesional dan berdaya saing dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut diperlukan teknik pengukuran atau formulasi yang tepat dan berapa target per tahunnya sehingga sasaran jangka menengah dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dapat tercapai.

Penentuan sasaran jangka menengah tersebut diatas telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai amanat UU

nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peratutan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2025 sampai dengan 2029 beserta indikator kinerja kami sajikan dalam tabel 3.1 untuk sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	-	84,07	84,25	84,5	84,75	85	85,25	85,5	85,5
		Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah	Skor kinerja Penegakan Produk Hukum Daerah	Angka	-	6,09	6,1	6,15	6,157	6,2	6,25	6,257	6,257
		Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Skor kinerja penyelenggaraan tibumtranmas	Angka	-	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	77,72	-	77,72	78	78,5	79	79,5	80	80
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	2,99	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	3,35

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	84	84,25	84,5	84,75	85	85,25	85,5	85,5

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Satpol Pp Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Jawa Tengah diperlukan strategi dan Kebijakan Satpol PP Provinsi Jawa tengah sebagai berikut :

Strategi :

Strategi yang akan ditempuh oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah adalah :

1. Peningkatan pengendalian gangguan tibum tranmas
   Strategi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kondusifitas 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui pengendalian ketertiban umumdan ketenteraman masyarakat serta pemeliharaan ketenraman dan ketertiban umum.
2. Peningkatan penegakkan produk hukum daerah
   Penegakkan Perda dan Pergub diawali dengan tindakan pre-emtif, preventif dilakukan melalui pendekatan persuasif sesuai standar operasional prosedur (SOP) melalui pembinaan, mediasi, komunikasi terakhir baru dilakukan penindakan pelanggar produk hukum daerah.
3. Pengembangan kapasitas PPNS, anggota Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar
   Peningkatan kapasitas anggota linmas perlu dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah antara lain berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelinmasan bagi anggota Linmas yang sangat dibutuhkan anggota linmas untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dlm menciptakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat
   Peran serta masyarakat dalam kepatuhan terhadap Perda dan Perkada serta terhadap ketentraman dan ketertiban umum perlu ditumbuhkan dengan cara-cara penyuluhan dan deteksi dini utuk menumbuhkan kesadaran diri dari masyarakat untuk mematuhi setiap peraturan yang ada.

Kebijakan :

Kebijakan dalam Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 :

1. Meningkatkan Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah;
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggar Produk Hukum Daerah;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas PPNS;
4. Meningkatkan Pengendalian, dan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Meningkatkan Konsolidasi Penanganan Tramtibum;
6. Meningkatkan Pembinaan Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap

Tibumtranmas;

7. Meningkatkan pemetaan daerah rawan tramtib & daerah rawan kebakaran;
8. Meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan anggota Linmas;
9. Meningkatkan kapasitas kelembagaan satlinmas;
10. Meningkatkan kapasitas/kualitas SDM Satpol PP & Damkar.

Digambarkan dalam tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	1. Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah	1. Meningkatkan penegakkan produk hukum daerah;	1. Peningkatan Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah; 2. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggar Produk Hukum Daerah; 3. Peningkatan kuantitas & kualitas PPNS
	2. Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1. Meningkatkan Pengendalian Gangguan Tibum Tranmas; 2. Mengembangkan kapasitas PPNS, anggota Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dlm menciptakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	1. Peningkatan Pengendalian, dan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 2. Peningkatan Konsolidasi Penanganan Tramtibum; 3. Peningkatan Pembinaan Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Tibumtranmas; 4. Peningkatan pemetaan daerah rawan tramtib & daerah rawan kebakaran; 5. Peningkatan keterampilan dan pemberdayaan anggota Linmas;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			6. Peningkatan kapasitas kelembagaan satlinmas; 7. Peningkatan kapasitas/kualitas SDM Satpol PP & Damkar.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2026-2030, maka Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menentukan tahapan prioritas pembangunan selama 5 tahun kedepan yang digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan penegakan produk hukum daerah melalui Penguatan Kelembagaan PPNS dan Sekretariat PPNS	Peningkatan Efektivitas Penegakan Produk Hukum Daerah	Penguatan sinergi lintas sektor dan daerah dalam penegakan produk hukum daerah	Pemantapan kualitas penegakan produk hukum daerah melalui optimalisasi peran PPNS dan instrumen penindakan.	Perwujudan penegakan produk hukum daerah yang sinergi dan berkelanjutan.
Penguatan pelaksanaan pembinaan kapasitas dasar PPNS, Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar.	Peningkatan Kapasitas SDM PPNS, Satpol PPNS, Satlinmas dan Damkar sesuai kebutuhan	Penguatan peran Satlinmas dalam deteksi dini potensi gangguan ketertiban	Pemantapan Satlinmas dalam pengamanan strategis/pemilu	Perwujudan SDM Satpol PP, PPNS, Satlinmas, dan Damkar yang profesional, berdaya saing dan kapabel
Penguatan Pelaksanaan Tibumtranmas sesuai SOP	Peningkatan pemetaan daerah rawan trantibum dan kebakaran yang terintegrasi	Penguatan deteksi dini dan patroli gabungan dalam pengendalian gangguan Tibumtranmas	Pemantapan pengendalian gangguan Tibumtranmas dengan kesiapsiagaan aparat dan masyarakat	Perwujudan partisipasi aktif masyarakat yang adaptif dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman berkelanjutan.
Penyusunan dasar pedoman penanggulangan kebakaran	Peningkatan pembinaan penanganan kebakaran	Penguatan koordinasi dan sinergi yang terintegrasi dalam penanganan kebakaran	pemantapan kualitas pemetaan daerah rawan yang adaptif dan terintegrasi	

3.3 Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Perencanaan yang berbasis risiko menjadi hal penting agar sejak awal perencanaan, perangkat daerah sudah dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang, dan sudah dilakukan upaya mitigasi sejak awal. Oleh karena itu dalam menyusun Renstra PD, manajemen risiko menjadi proses yang terintegrasi dan dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Renstra PD. Proses manajamen risiko berdasarkan pada Pergub Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.3
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Satpol PP Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah	Skor kinerja penegakan produk hukum daerah	Tingginya pelanggaran Produk Hukum Daerah	Risiko Strategis	1) Penegakan Perda dan Perkada belum optimal 2) Kebijakan penegakan perda dan perkada belum optimal	Target Kinerja Pembangunan Daerah Tidak Tercapai	1) Pelibatan OPD Teknis dalam pelaksanaan Preemtif dan Preventif (Sosialisasi, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian) 2) Penindakan secara represif bersama Kabupaten/Kota, OPD Teknis, TNI, POLRI, Kecamatan, dan Desa	Kasatpol PP	2026-2030
			Risiko Kepatuhan	Masyarakat tidak patuh terhadap perda dan perkada	Target Kinerja Pembangunan Daerah Tidak Tercapai	1) Meningkatkan publikasi dan penyebaran informasi ketentuan Perda / Perkada 2)Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan ketentuan Perda/Perkada terhadap pelanggar.	Kasatpol PP	2026-2030
Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas)	Terjadinya konflik di masyarakat	Risiko Strategis	1. Penyelenggaraan event /kegiatan (olahraga, Pilkades dll) 2. Miss Informasi 3. Ujaran kebencian yang masif 4. Kebijakan pemerintah yang tidak populis	Terjadi gangguan Trantibum di Jawa Tengah	1) Patroli wilayah, deteksi dini dan cegah dini, pengamanan strategis 2)Melibatkan peran serta Satpol PP Kab/Kota	Kasatpol PP	2026-2030
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Tidak diimplementasikannya budaya risiko	Risiko Strategis	Rendahnya pemahaman budaya risiko	Terjadinya Risiko Perangkat Daerah	1)FGD Penyusunan MR 2) Melibatkan Bappeda dan Inspektorat pada proses penyusunan Dokumen Manajemen Risiko 3) Pengikutsertaan workshop MR	Kasatpol PP	2026-2030

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 40 sub kegiatan sebagai berikut :

I PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota

a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat;
d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
e. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan;
b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan;
c. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

a. Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian; SPM sub urusan trantibum;
b. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS;

II PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN

1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

a. Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
b. Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran;

III PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

8 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
c. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;
d. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral;

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Periode 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *												21.309.100.000		20.274.100.000		20.854.100.000		21.444.100.000		22.024.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah *	Angka	N/A	77,72	78		78,5		79		79,5		80		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah **											260.000.000		310.000.000		360.000.000		410.000.000		460.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah **	Angka	2,99	3,1	3,15	260.000.000	3,2	310.000.000	3,25	360.000.000	3,3	410.000.000	3,35	460.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									260.000.000		310.000.000		360.000.000		410.000.000		460.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ***	%	100	100	100	260.000.000	100	310.000.000	100	360.000.000	100	410.000.000	100	460.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								260.000.000		310.000.000		360.000.000		410.000.000		460.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	100	260.000.000	100	310.000.000	100	360.000.000	100	410.000.000	100	460.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	8	8	8	125.000.000	8	150.000.000	8	175.000.000	8	200.000.000	8	225.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	4	4	6	125.000.000	6	150.000.000	6	175.000.000	6	200.000.000	6	225.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	2	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terselenggarannya Validata Pendukung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	Dokumen	N/A	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
						Statistik Sektoral Daerah	Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****															
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah **											21.049.100.000		19.964.100.000		20.494.100.000		21.034.100.000		21.564.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah **	Angka	84	84,25	84,5	21.049.100.000	84,75	19.964.100.000	85	20.494.100.000	85,25	21.034.100.000	85,5	21.564.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									21.049.100.000		19.964.100.000		20.494.100.000		21.034.100.000		21.564.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	100	21.049.100.000	100	19.964.100.000	100	20.494.100.000	100	21.034.100.000	100	21.564.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								12.375.000.000		12.905.000.000		13.435.000.000		13.965.000.000		14.495.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	13	13	13	12.375.000.000	13	12.905.000.000	13	13.435.000.000	13	13.965.000.000	13	14.495.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							12.000.000.000		12.500.000.000		13.000.000.000		13.500.000.000		14.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ** ***	Orang/Bulan	80	80	80	12.000.000.000	80	12.500.000.000	80	13.000.000.000	80	13.500.000.000	80	14.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							325.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000		425.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	325.000.000	12	350.000.000	12	375.000.000	12	400.000.000	12	425.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ** ***							50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								139.100.000		139.100.000		139.100.000		139.100.000		139.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	139.100.000	1	139.100.000	1	139.100.000	1	139.100.000	1	139.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan							139.100.000		139.100.000		139.100.000		139.100.000		139.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Barang Milik Daerah SKPD * ****																	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	139.100.000	1	139.100.000	1	139.100.000	1	139.100.000	1	139.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	280.000.000	100	280.000.000	100	280.000.000	100	280.000.000	100	280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	2	2	2	160.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	8	2	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****							60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	140	70	70	60.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								1.235.000.000		1.235.000.000		1.235.000.000		1.235.000.000		1.235.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *****	%	100	100	100	1.235.000.000	100	1.235.000.000	100	1.235.000.000	100	1.235.000.000	100	1.235.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor *****							55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan * ****	Paket	1	1	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								1.625.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *****	Unit	23	11	11	1.625.000.000	13	950.000.000	11	950.000.000	13	950.000.000	11	950.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	3	1	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							975.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan * ****	Unit	20	10	10	975.000.000	12	300.000.000	10	300.000.000	12	300.000.000	10	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								3.105.000.000		3.105.000.000		3.105.000.000		3.105.000.000		3.105.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	3	3	3	3.105.000.000	3	3.105.000.000	3	3.105.000.000	3	3.105.000.000	3	3.105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik * ****							350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor * ****							2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	2.750.000.000	1	2.750.000.000	1	2.750.000.000	1	2.750.000.000	1	2.750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								2.290.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.360.000.000		1.360.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	75	75	75	2.290.000.000	75	1.350.000.000	75	1.350.000.000	75	1.360.000.000	75	1.360.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							640.000.000		640.000.000		640.000.000		650.000.000		650.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	20	20	21	640.000.000	21	640.000.000	21	640.000.000	21	650.000.000	21	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	52	52	52	110.000.000	52	110.000.000	52	110.000.000	52	110.000.000	52	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							1.440.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	1.440.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	2	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tabel 4.2

Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Prioritas	Rencana Aktifitas Riil	Output/target/Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah	Melakukan Bimbingan Teknis Operasional kepada PPNS OPD Provinsi dan PPNS Satpol PP Kab/Kota	Terlaksananya Bimtek PPNS yang ditingkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam melaksanakan teknis operasional Penegakan Perda dan Pergub	PPROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/ Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi/ Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Bidang Penegakan Hukum Daerah	1. Korwas PPNS Polda Jateng; 2. Kejati Jateng; 3. Pengadilan Tinggi Jateng; 4. Akademisi/ Praktisi Hukum; 5. PPNS OPD Pemprov Jateng; 6. PPNS Satpol PP Kab/Kota
		Penyiapan dukungan operasional sekretariat PPNS dan Melakukan mekanisme proses penyidikan pelanggaran produk hukum daerah secara yustisi	Tersedianya dokumen Laporan operasional sekratriat PPNS/ 5 dokumen	PPROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/ Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi/ Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Bidang Penegakan Hukum Daerah	1. KORWAS PPNS Polda Jateng; 2. Kejati Jateng; 3. Pengadilan Tinggi Jateng; 4. PPNS OPD Pemprov Jateng ; 5. TNI
		Melakukan penyampaian informasi dan pemahaman terkait ketentuan Perda dan Pergub untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran	Terlaksananya sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur/250 orang	PPROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur/ Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	Bidang Penegakan Hukum Daerah	1. OPD Teknis Pengampu Perda; 2. SMA/SMK; 3. Satpol PP Kab/Kota; 4. Dispermasdes (Posyandu)
		Melakukan pemantauan, pengamatan dan pengumpulan informasi situasi dan kondisi lapangan terkini (up to date) pelanggaran Perda dan Pergub	Terlaksananya kegiatan Patroli pengawasan/25 kegiatan	PPROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur/ Pengawasan Atas Pelanggaran Perda dan Pergub	Bidang Penegakan Hukum Daerah	1. OPD Teknis Pemprov Jateng Pengampu Perda; 2. TNI; 3. POLRI; 4. Kejaksaan
		Melakukan tindakan membina dan menyuluh dalam rangka memberikan pengetahuan, pemahaman dan penerangan terkait reward and punishment pelanggaran Perda dan Pergub	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyuluhan/25 kegiatan	PPROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur/ Pengawasan Atas Pelanggaran Perda dan Pergub	Bidang Penegakan Hukum Daerah	1. OPD Teknis Pemprov Jateng Pengampu Perda; 2. TNI; 3. POLRI; 4. Kejaksaan

No.	Program Prioritas	Rencana Aktifitas Riil	Output/target/Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		Melakukan pendataan, mapping dan rekapitulasi data pelanggaran Perda dan Pergub	Tersedianya dokumen data inventaridasi dan pendataan pelanggaran/5 dokumen	PPROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur/Penangan an atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Bidang Penegakan Hukum Daerah	1. OPD Teknis Pemprov Jateng Pengampu Perda; 2. Satpol PP Kab/Kota; 3. TNI; 4. Polri; 5. Kec; 6. Desa/ Keluraha
		Melakukan penindakan (penertiban non yusticial) pelanggaran Perda dan Pergub	Terlaksananya penindakan/60 kegiatan	PPROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur/Penangan an atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Bidang Penegakan Hukum Daerah	1. OPD Teknis Pemprov Jateng Pengampu Perda; 2. Satpol PP Kab/Kota; 3. TNI; 4. Polri; 5. Kec; 6. Desa/ Kelurahan
2	Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali	Penegakan regulasi daerah terkait air tanah				1. Dinas ESDM 2. DInas PUPR

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan/dan atau sasaran sedangkan Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah merujuk pada indikator program pada Bab III, Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel :

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN TAHUN						KONDISI AKHIR
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibum	-	84,07	84,25	84,5	84,75	85	85,25	85,5	85,5
2	Skor kinerja Penegakan Produk Hukum Daerah	-	6,09	6,1	6,15	6,157	6,2	6,25	6,257	6,257
3	Skor kinerja penyelenggaraan tibumtranmas	-	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
4	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,72	77,75	77,75	78	78,5	79	79,5	80	80

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN TAHUN						KONDISI AKHIR
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	-	80	80	85,71	85,71	92,86	92,86	100	100
2	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.5
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN TAHUN						KONDISI AKHIR
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga	100	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan acuan dan pedoman bagi Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan setiap tahunnya untuk sehingga visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2029. Renstra juga sebagai dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dokumen Renstra ini juga menjadi panduan bagi Satpol PP kabupaten/kota se Jawa Tengah untuk menyusun perencanaan strategis dalam rangka ikut serta bersama membangun Jawa Tengah untuk mendukung tercapainya tujuan daerah tahun 2025-2029 yaitu **"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan".**

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perubahan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 harus dipedomani oleh semua komponen Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Peningkatkan kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah;
2. Peningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah.

Renstra ini dapat juga menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pada tahun tersebut. Apabila dalam berjalannya waktu sebelum berakhirnya periode Renstra terdapat kebijakan yang memungkinkan dilakukan perubahan, maka Renstra ini dapat dilakukan revisi sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku.

Dalam hal ditengah pelaksanaan periode Renstra 2025 – 2029 ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka Satpol PP Prov. Jateng akan melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan tetap mempriotiaskan ketercapaian target yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah ini dapat menjadi pedoman perencanaan dan mewujudkan suatu kondisi masyarakat Jawa Tengah yang taat pada peraturan produk hukum daerah, tertib dan tenteram.

POHON KINERJA

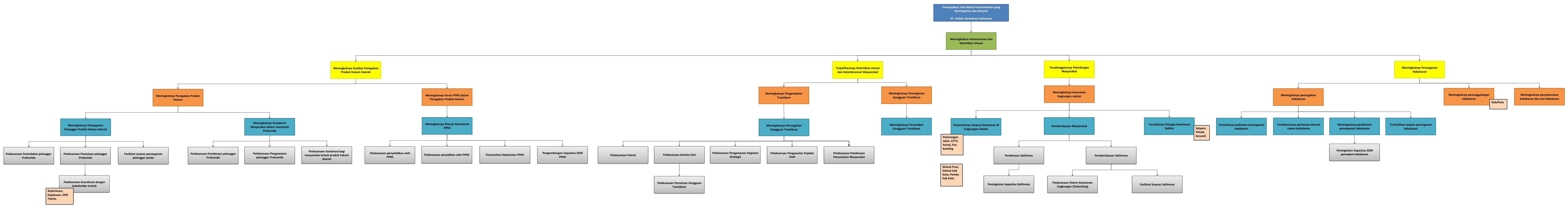

TUJUAN		**Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum**									
Indikator		Indeks Penyelenggaraan Trantibum									
SASARAN		Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah			Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat						
INDIKATOR SASARAN		Skor kinerja penegakan produk hukum daerah			Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas)						
PROGRAM		**PPROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	
INDIKATOR	a	Persentase Penegakan Peraturan Daerah			Persentase Pengendalian Tibumtranmas			Persentase kab/kota dengan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas berkategori baik		Persantase Kab/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	
KEGIATAN	**1**	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**1**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1**	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan**	
INDIKATOR KEGIATAN		Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani			Jumlah tindakan pencegahan gangguan Tibumtranmas			Jumlah danru Satlinmas yang dibina		Persentase Kab Kota yang telah dilakukan Pemetaan Rawan Kebakaran	
SUB KEG	**1.1**	**Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur**	**1.1**		**Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**	**1.1**		**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat**	**1.1**	**Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran**	
INDIKATOR SUB KEG		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan			Jml personil Satgas Linmas dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya		Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	
INDIKATOR KEGIATAN		Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi			Jumlah tindakan penanganan gangguan Tibumtranmas			Persentase Linmas yang diberdayakan		Persentase Kab/Kota yang dibina terkait penanganan kebakaran	
SUB KEG	**1.2**	**Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur**	**1.2**		**Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**	**1.2**		**Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1.2**	**Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota**	
INDIKATOR SUB KEG		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	
SUB KEG	**1.3**	**Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur**									
INDIKATOR SUB KEG		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur									
KEGIATAN	**2**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**									
INDIKATOR KEGIATAN		Jumlah PPNS yang dilakukan pembinaan									
SUB KEG	**2.1**	**Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum**									
INDIKATOR SUB KEG		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda									
SUB KEG	**2.2**	**Dukungan Operasional Sekretariat PPNS**									
INDIKATOR SUB KEG		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS									
KEGIATAN	**3**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (SPM)**									
INDIKATOR KEGIATAN		Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas									
SUB KEG	**3.1**	**Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**									
INDIKATOR SUB KEG		Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada									

Manajemen Risiko Perangkat Daerah 2025-2029

a. Identifikasi Risiko

Tabel 1

Identifikasi Risiko

No	Jenis KonteksRisiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah	Skor kinerja penegakan produk hukum daerah	Tingginya pelanggaran Produk Hukum Daerah	Risiko Strategis	1) Penegakan Perda dan Perkada belum optimal 2) Kebijakan penegakan perda dan perkada belum optimal	Target Kinerja Pembangunan Daerah Tidak Tercapai	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
					Risiko Kepatuhan	Masyarakat tidak patuh terhadap perda dan perkada	Target Kinerja Pembangunan Daerah Tidak Tercapai	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
2	Sasaran Strategis	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Terjadinya konflik di masyarakat	Risiko Strategis	1. Penyelenggaraan event /kegiatan (olahraga, Pilkades dll) 2. Miss Informasi 3. Ujaran kebencian yang masif 4. Kebijakan pemerintah yang tidak populis	Terjadi gangguan Trantibum di Jawa Tengah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Tidak diimplementasikannya budaya risiko	Risiko Strategis	Rendahnya pemahaman budaya risiko	Terjadinya Risiko Perangkat Daerah	Satpol PP Provinsi Jawa Tengah
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan tidak sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan	Risiko Strategis	Kualitas SDM yang kurang memadai	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat	Satpol PP Provinsi Jawa Tengah

b. Analisis Risiko

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Tingginya pelanggaran Produk Hukum Daerah	5	5	25 (sangat tinggi)	Ada	Pelibatan OPD Teknis dalam pelaksanaan Preemtif dan Preventif (Sosialisasi, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian)	Memadai	4	4	16(sangat tinggi)
	5	5	25 (sangat tinggi)	Ada	Meningkatkan publikasi dan penyebaran informasi ketentuan Perda / Perkada	Memadai	4	4	16 (sangat tinggi)
Terjadinya konflik di masyarakat	5	5	25 (sangat tinggi)	Ada	Patroli wilayah, deteksi dini dan cegah dini, pengamanan strategis	Memadai	4	4	16 (sangat tinggi)
Tidak diimplementasikannya budaya risiko	4	5	20 (sangat tinggi)	Ada	FGD Penyusunan MR	Memadai	3	5	15 (sangat tinggi)
Pelayanan tidak sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan	3	3	9 (sedang)	Ada	Memberikan pembinaan kepada personil yang melaksanakan pelayanan	Memadai	2	3	6 (sedang)

c. Penetapan Risiko Prioritas

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Tingginya pelanggaran Produk Hukum Daerah	16 (sangat tinggi)	Kasatpol PP	1) Penegakan Perda dan Perkada belum optimal 2) Kebijakan penegakan perda dan perkada belum optimal	Target Kinerja Pembangunan Daerah Tidak Tercapai
Terjadinya konflik di masyarakat	16 (Sangat Tinggi)	Kasatpol PP	1. Penyelenggaraan event /kegiatan (olahraga, Pilkades dll) 2. Miss Informasi 3. Ujaran kebencian yang masif 4. Kebijakan pemerintah yang tidak populis	Terjadi gangguan Trantibum di Jawa Tengah
Tingginya pelanggaran Produk Hukum Daerah	16 (sangat tinggi)	Kasatpol PP	Masyarakat tidak patuh terhadap perda dan perkada	Target Kinerja Pembangunan Daerah Tidak Tercapai
Tidak diimplementasikannya budaya risiko	15 (sangat tinggi)	Kasatpol PP	Rendahnya pemahaman budaya risiko	Terjadinya Risiko Perangkat Daerah

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran Strategis	Skor kinerja penegakan produk hukum daerah	Tingginya pelanggaran Produk Hukum Daerah	16 (sangat tinggi)	1) Penegakan Perda dan Perkada belum optimal 2) Kebijakan penegakan perda dan perkada belum optimal	Target Kinerja Pembangunan Daerah Tidak Tercapai	1) Pelibatan OPD Teknis dalam pelaksanaan Preemtif dan Preventif (Sosialisasi, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian) 2) Penindakan secara represif bersama Kabupaten/Kota, OPD Teknis, TNI, POLRI, Desa dan Kecamatan	Kasatpol PP	2026-2030
Sasaran Strategis	Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas)	Terjadinya konflik di masyarakat	16 (Sangat Tinggi)	1. Penyelenggaraan event /kegiatan (olahraga, Pilkades dll) 2. Miss Informasi 3. Ujaran kebencian yang masif 4. Kebijakan pemerintah yang tidak populis	Terjadi gangguan Trantibum di Jawa Tengah	1) Patroli wilayah, deteksi dini dan cegah dini, pengamanan strategis 2)Melibatkan peran serta Satpol PP Kab/Kota	Kasatpol PP	2026-2030
Sasaran Strategis	Skor kinerja penegakan produk hukum daerah	Tingginya pelanggaran Produk Hukum Daerah	16 (sangat tinggi)	Masyarakat tidak patuh terhadap perda dan perkada	Target Kinerja Pembangunan Daerah Tidak Tercapai	1) Meningkatkan publikasi dan penyebaran informasi ketentuan Perda / Perkada 2)Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan ketentuan Perda/Perkada terhadap pelanggar.	Kasatpol PP	2026-2030

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran Strategis	Indeks Manajemen Risiko	Tidak diimplementasikannya budaya risiko	15 (sangat tinggi)	Rendahnya pemahaman budaya risiko	Terjadinya Risiko Perangkat Daerah	1)FGD Penyusunan MR 2) Melibatkan Bappeda dan Inspektorat pada proses penyusunan Dokumen Manajemen Risiko 3) Pengikutsertaan workshop MR	Kasatpol PP	2026-2030

DINAS SOSIAL

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Adapun Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029 adalah **"Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045"** .

Langkah awal penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah nomor 256 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Penyusun Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2025- 2029. Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan menganalisis situasi dan evaluasi kinerja periode sebelumnya serta mengidentifikasi isu-isu strategis yang relevan seperti dinamika populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), kemiskinan ekstrem, perkembangan data kesejahteraan sosial, serta tantangan bencana sosial.

Secara substansi, Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Sosial sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD, serta dalam rangka menjabarkan dukungan rencana kegiatan/sub kegiatan/aktivitas terhadap 136 Program Daerah dalam lima tahun ke depan. Selain itu penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah juga mengacu pada Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2025-2029 yang mempunyai visi "Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045", dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif.

Keterkaitan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan dokumen perencanaan lainnya secara detail dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

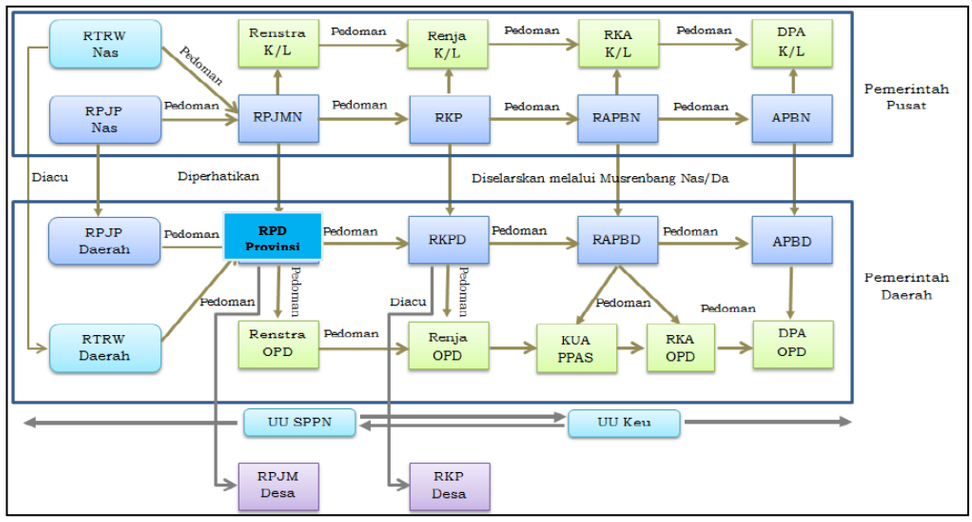

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Selanjutnya Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

h) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

j) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

k) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):

m) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daearh Tahun 2025-2029;

n) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 48);

o) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 82);

p) Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7.2.2/0002764 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;

q) Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7.2.4/0002829 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, permasalahan pelayanan perangkat daerah serta isu strategis perangkat daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan arah kebijakan, serta manajemen risiko Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, juga ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun kesesuaian anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

A. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

a. Tugas

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Penanganan Fakir Miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Penanganan Fakir Miskin;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Penanganan Fakir Miskin;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sedangkan untuk UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yakni sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

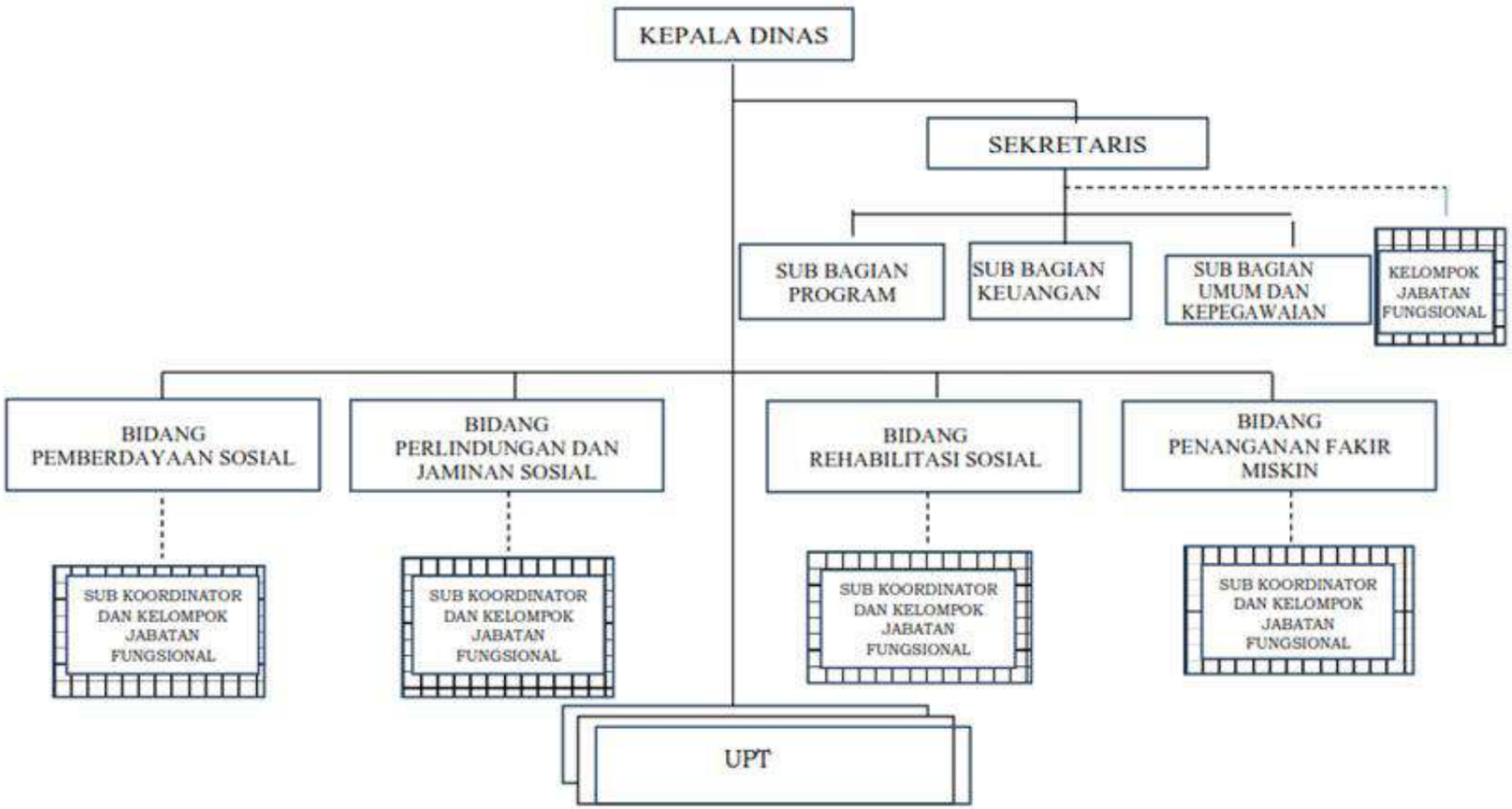

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

STRUKTUR ORGANISASI PANTI PELAYANAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

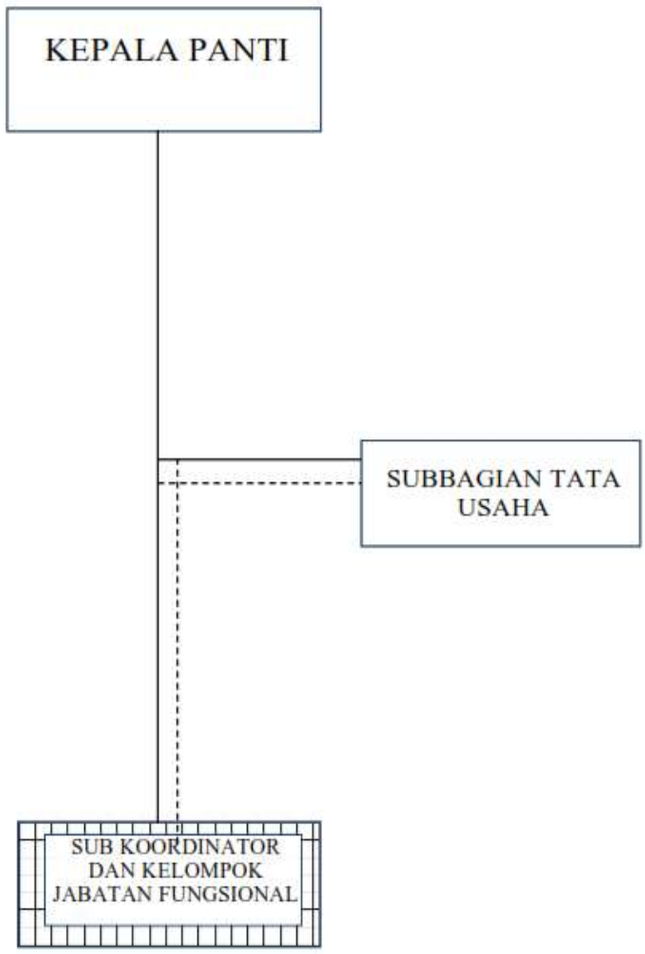

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.1. Daftar Nama Panti Pelayanan Sosial, Daya Tampung, dan Lokasi Persebaran

No	Nama Panti	Nama Rumah Pelayanan Sosial	Daya Tampung Eksisting	Jenis Pelayanan	Tempat Kedudukan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Panti Pelayanan Sosial "MARDI UTOMO"		110	Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar	Kota Semarang
		Rumah Pelayanan Sosial "WENING WARDOYO"	90	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Semarang
		Rumah Pelayanan Sosial "PUCANG GADING"	120	Lanjut Usia Terlantar	Kota Semarang
2	Panti Pelayanan Sosial "WORO WILOSO"		130	Anak Terlantar	Kota Salatiga
		Rumah Pelayanan Sosial "WIRA ADHI KARYA"	70	Anak Terlantar	Kota Semarang
		Rumah Pelayanan Sosial "WILOSOTOMO"	30	Anak Balita Terlantar	Kota Salatiga
		Rumah Pelayanan Sosial "PAMARDI UTOMO"	80	Anak Terlantar	Kabupaten Boyolali
3	Panti Pelayanan Sosial "TURUS GEDE"		70	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Rembang
		Rumah Pelayanan Sosial "MARGO MUKTI"	75	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Rembang

No	Nama Panti	Nama Rumah Pelayanan Sosial	Daya Tampung Eksisting	Jenis Pelayanan	Tempat Kedudukan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	Panti Pelayanan Sosial “NGUDI RAHAYU”		190	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Kendal
		Rumah Pelayanan Sosial “WELERI”	40	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Kendal
		Rumah Pelayanan Sosial “CEPIRING”	100	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Kendal
5	Panti Pelayanan Sosial “PANGRUKTI MULYO”		140	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Rembang
		Rumah Pelayanan Sosial “PAMARDI KARYA”	60	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Blora
6	Panti Pelayanan Sosial “KASIH MESRA”		80	Anak Terlantar	Kabupaten Demak
		Rumah Pelayanan Sosial “PAMARDI MULYO”	50	Penyandang Disabilitas Intelektual	Kabupaten Demak
		Rumah Pelayanan Sosial “SONO RUMEKSO”	85	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Grobogan
7	Panti Pelayanan Sosial “PENDOWO”		50	Penyandang Disabilitas Sensorik Netra	Kabupaten Kudus
		Rumah Pelayanan Sosial ”MURIA JAYA”	65	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Kudus

No	Nama Panti	Nama Rumah Pelayanan Sosial	Daya Tampung Eksisting	Jenis Pelayanan	Tempat Kedudukan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
8	Panti Pelayanan Sosial “POTROYUDAN”		85	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Jepara
		Rumah Pelayanan Sosial “WALUYOTOMO”	100	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Jepara
9	Panti Pelayanan Sosial “WANODYATAMA”		120	Eks Wanita Tuna Susila	Kota Surakarta
		Rumah Pelayanan Sosial “BHAKTI CANDRASA"	50	Penyandang Disabilitas Sensorik Netra	Kota Surakarta
		Rumah Pelayanan Sosial “TAWANG MANGU”	75	Anak Terlantar	Kabupaten Karanganyar
10	Panti Pelayanan Sosial “TARUNA YODHA”		80	Anak Terlantar	Kabupaten Sukoharjo
		Rumah Pelayanan Sosial “ESTITOMO”	120	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Wonogiri
		Rumah Pelayanan Sosial “HESTINING BUDI”	65	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Klaten
11	Panti Pelayanan Sosial “DHARMA PUTERA”		80	Anak Terlantar	Kabupaten Purworejo
		Rumah Pelayanan Sosial “MARDIGUNO”	50	Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar	Kabupaten Kebumen

No	Nama Panti	Nama Rumah Pelayanan Sosial	Daya Tampung Eksisting	Jenis Pelayanan	Tempat Kedudukan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Rumah Pelayanan Sosial "WIRA KARYA TAMA"	35	Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara	Kabupaten Purworejo
12	Panti Pelayanan Sosial "ADI YUSWO"		100	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Purworejo
		Rumah Pelayanan Sosial "WILOSO WREDHO"	60	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Purworejo
13	Panti Pelayanan Sosial "DEWANATA"		100	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Cilacap
		Rumah Pelayanan Sosial "MARTANI"	83	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Cilacap
		Rumah Pelayanan Sosial "JERUKLEGI"	50	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Cilacap
		Rumah Pelayanan Sosial "SUDAGARAN"	95	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Banyumas
14	Panti Pelayanan Sosial "RAHARJO"		100	Penyandang Disabilitas Intelektual	Kabupaten Sragen
		Rumah Pelayanan Sosial "MOJO MULYO"	50	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Sragen
		Rumah Pelayanan Sosial "GONDANG"	40	PMKS	Kabupaten Sragen

No	Nama Panti	Nama Rumah Pelayanan Sosial	Daya Tampung Eksisting	Jenis Pelayanan	Tempat Kedudukan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Rumah Pelayanan Sosial "PAMARDI SIWI"	100	Anak Terlantar	Kabupaten Sragen
15	Panti Pelayanan Sosial "SAMEKTO KARTI"		175	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Pemalang
		Rumah Pelayanan Sosial "TALUN"	40	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Pekalongan
		Rumah Pelayanan Sosial "KARYA MANDIRI"	40	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Pemalang
16	Panti Pelayanan Sosial "BOJONGBATA"		105	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Pemalang
		Rumah Pelayanan Sosial "DISTRARASTRA"	50	Penyandang Disabilitas Sensorik Netra	Kabupaten Pemalang
		Rumah Pelayanan Sosial "BISMA UPAKARA"	110	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Pemalang
17	Panti Pelayanan Sosial "PENGANTHI"		75	Penyandang Disabilitas Sensorik Netra	Kabupaten Temanggung
		Rumah Pelayanan Sosial "KUMUDA PUTERA PUTERI"	120	Anak Terlantar	Kota Magelang

No	Nama Panti	Nama Rumah Pelayanan Sosial	Daya Tampung Eksisting	Jenis Pelayanan	Tempat Kedudukan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
18	Panti Pelayanan Sosial “MARGO WIDODO”		170	PMKS	Kota Semarang
		Rumah Pelayanan Sosial “BINA SEJAHTERA”	60	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Kendal
		Rumah Pelayanan Sosial “MANDIRI”	50	Anak Terlantar	Kota Semarang
19	Panti Pelayanan Sosial “SUKO MULYO”		95	Anak Terlantar	Kota Tegal
		Rumah Pelayanan Sosial “PUTERA HARAPAN”	50	Anak Terlantar	Kabupaten Tegal
		Rumah Pelayanan Sosial “KLAMPOK”	90	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Brebes
20	Panti Pelayanan Sosial “MARDI YUWONO”		70	Anak Terlantar	Kabupaten Wonosobo
		Rumah Pelayanan Sosial “PAMARDI RAHARJO”	50	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Banjarnegara
TOTAL DAYA TAMPUNG			4.623		

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah

Sumber Daya merupakan faktor penting penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. Adapun kondisi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana matriks berikut:

Tabel 2.2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan							JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA/SMK	DIII	S1/DIV	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH**								
	ASN	1	1	19	9	38	15	1	84
	NON ASN	1	1	24	5	22	0	0	**53**
2	**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROV. JAWA TENGAH**								
	ASN	8	16	163	23	250	44	0	504
	NON ASN	15	10	248	34	56	0	0	**363**
	TOTAL								**1004**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2024

Tabel 2.3. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	LOKASI	PANGKAT / GOLONGAN						JUMLAH
		I	II	III	IV	IX	NON ASN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS SOSIAL PROV JAWA TENGAH	1	15	56	10	2	53	137
2	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROV. JAWA TENGAH	4	112	261	53	74	363	867
	TOTAL							**1004**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2024

Sebagaimana yang tercantum di dalam standar teknis pelayanan dasar SPM, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengkategorisasikan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial ke dalam 3 (tiga) golongan terdiri atas Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS). Kategorisasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dilakukan dengan memperhatikan satuan standar yang meliputi standar kualifikasi dan standar pembinaan, adapun pengkategorisasian SDM penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana matriks berikut:

Tabel 2.4. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Kategorisasi

NO	UNIT KERJA	KATEGORISASI SDM			JUMLAH
		PEKSOS	PENSOS	TKS	
1	**DINAS SOSIAL PROV JAWA TENGAH**				
	ASN	15	3	0	**18**
	NON ASN	0	0	0	0
2	**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROV JAWA TENGAH**				
	ASN	222	69		**291**
	NON ASN	0	0		0
	TOTAL				**309**

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2024

Tabel 2.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Uraian		Jumlah	Nilai Aset
1	**2**		**3**	**4**
1	1.3.1.01	TANAH	88	146.362.054.640
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	48	1.601.687.298
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	238	18.702.644.199
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	73	203.406.450
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	4	27.935.000
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	10.192	23.833.154.517
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	129	582.376.000
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	301	621.124.275
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	14	46.630.100
10	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-	-
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	864	6.442.444.225
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	22	112.890.000
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-	-
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	22	61.695.000
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	784	183.378.360.857
22	1.3.3.02	MONUMEN	2	32.619.000
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	17	3.649.069.108

No.	Uraian		Jumlah	Nilai Aset
1	2		3	4
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	3	52.859.000
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	41	3.527.870.556
27	1.3.4.03	INSTALASI	1	15.000.000
28	1.3.4.04	JARINGAN	1	500.000
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	4.844	307.644.882
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/ KEBUDAYAAN/ OLAH RAGA	76	350.774.000
31	1.3.5.03	HEWAN	-	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	-	-
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-
			17.764	**389.912.739.407**

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 merupakan pijakan strategi penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2025-2029, guna memberikan gambaran keberhasilan maupun permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun pencapaian kinerja tahun 2020 s.d. 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Renstra PD Tahun 2018-2023																			
A	Tujuan PD																			
1	Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)																			
	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					0,95	1,42	1,9	2,37		0,95	1,42	5,55	8,03		100	100	292,10	338,82	
2	Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)																			
	Persentase Peningkatan kapasitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)					11,99	15,84	25,74	34,38		11,99	15,84	25,74	36,59		100	100	100	106,42	
B	Sasaran PD																			
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani																			
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ditangani yang meningkat kesejahteraan sosialnya					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100	100	100	100	
2	Meningkatnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial																			
	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya setelah mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C	Program																			
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																			
	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas					11,99	15,84	25,74	34,38		11,99	15,84	25,74	36,59		100	100	100	106,43	
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN																			
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan					100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																			
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					1,64	2,46	3,28	4,1		1,64	2,46	3,28	4,1		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,06	0,09	0,12	0,15		0,06	0,09	0,12	0,15		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,06	0,09	0,13	0,16		0,06	0,09	0,13	0,16		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,07	0,11	0,14	0,18		0,07	0,11	0,14	0,18		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,09	0,13	0,17	0,22		0,09	0,13	0,17	0,22		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,05	0,08	0,11	0,13		0,05	0,08	0,11	0,13		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,05	0,08	0,11	0,13		0,05	0,08	0,11	0,13		100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,06	0,1	0,13	0,16		0,06	0,1	0,13	0,16		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,04	0,06	0,08	0,11		0,04	0,06	0,08	0,11		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,06	0,09	0,12	0,15		0,06	0,09	0,12	0,15		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,08	0,12	0,17	0,21		0,08	0,12	0,17	0,21		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,09	0,14	0,18	0,23		0,09	0,14	0,18	0,23		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,07	0,1	0,14	0,17		0,07	0,1	0,14	0,17		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,06	0,08	0,11	0,14		0,06	0,08	0,11	0,14		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,08	0,13	0,17	0,21		0,08	0,13	0,17	0,21		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,04	0,06	0,07	0,09		0,04	0,06	0,07	0,09		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,11	0,17	0,22	0,28		0,11	0,17	0,22	0,28		100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,03	0,04	0,06	0,07		0,03	0,04	0,06	0,07		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,07	0,11	0,14	0,18		0,07	0,11	0,14	0,18		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,06	0,08	0,11	0,14		0,06	0,08	0,11	0,14		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,09	0,13	0,18	0,22		0,09	0,13	0,18	0,22		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,06	0,09	0,13	0,16		0,06	0,09	0,13	0,16		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,09	0,14	0,18	0,23		0,09	0,14	0,18	0,23		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,03	0,04	0,06	0,07		0,03	0,04	0,06	0,07		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,03	0,04	0,06	0,07		0,03	0,04	0,06	0,07		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,03	0,05	0,07	0,08		0,03	0,05	0,07	0,08		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,05	0,07	0,1	0,12		0,05	0,07	0,1	0,12		100	100	100	100	
	Persentase PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti					0,04	0,07	0,09	0,11		0,04	0,07	0,09	0,11		100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																			
	Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan					100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial					0,73	1,09	1,46	8,21		0,73	1,09	5,53	8,21		100	100	378,77	100	
	Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan					0,11	0,14	0,23	0,44		0,11	0,14	0,38	0,44		100	100	165,22	100	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA																			
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan					100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																			
	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola					100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Renstra PD Tahun 2024-2026																			
A	Tujuan PD																			
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)																			
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya									2,46					2,46					100
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan birokrasi di perangkat daerah																			
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)									82,18					80,95					98,5
B	Sasaran PD																			
1	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial									0,20					0,20					100
2	Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi korban bencana yang memenuhi SPM Bidang Sosial																			
	Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial									0,05					0,05					100
3	Terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran																			
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial									1,98					1,98					100
4	Meningkatnya kemandirian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkelanjutan																			
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial									0,22					0,22					100
5	Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial																			
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial									7,77					7,77					100
C	Program																			
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																			
	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial									7,7					7,7					100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN																			
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan									100					100					100
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																			
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									1,92					1,92					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,07					0,07					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,07					0,07					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,08					0,08					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,10					0,10					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,06					0,06					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,06					0,06					100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,09					0,09					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,05					0,05					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,07					0,07					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,09					0,09					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,11					0,11					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,08					0,08					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,06					0,06					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,12					0,12					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,04					0,04					100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,12					0,12					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,03					0,03					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,11					0,11					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,06					0,06					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,11					0,11					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,06					0,06					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,11					0,11					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,03					0,03					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,03					0,03					100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,04					0,04					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,06					0,06					100
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti									0,05					0,05					100
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																			
	Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan									100					100					100
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial									1,98					1,98					100
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan									0,22					0,22					100
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA																			
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan									100					100					100
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																			
	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola									100					100					100

Program Pemberdayaan Sosial memiliki indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi. Kendala dalam penyelenggaraan program ini yaitu pelaksanaan penyaluran hibah seringkali tidak sesuai waktu yang ditetapkan karena calon penerima hibah tidak sesuai kriteria/klasifikasi dan proses melengkapi persyaratan berkas membutuhkan waktu lama. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melakukan koordinasi dengan mitra pelaksana hibah dan calon penerima hibah menggunakan Buku Saku Hibah Bansos Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman. Manfaat penyelenggaraan program pemberdayaan sosial yaitu meningkatnya PSKS melalui kegiatan penguatan kapasitas PSKS dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Program Pemberdayaan Sosial didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1) *Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi* dengan keluaran 100 dokumen penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab/kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan. Permasalahan yang dihadapi yaitu masih adanya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan uang atau Barang (PUB) yang belum melakukan perizinan. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan UGB atau PUB. Manfaat yang diperoleh yaitu meminimalisir adanya penipuan yang berkedok undian gratis berhadiah.

2) *Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi* dengan keluaran 1.076 orang PSKS yang mendapatkan peningkatan Kapasitas dan 1.000 orang PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan ini yaitu masih banyak LKS yang belum mengikuti akreditasi dan SDM Penyelenggara Kesos yang belum tersertifikasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengusulan akreditasi dan sertifikasi. Manfaat dari kegiatan tersebut yaitu bertambahnya jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta meningkatnya jaringan kerjasama, kemitraan dan sinergitas PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan akreditasi lembaga.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan memiliki indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi. Kendala dalam penyelenggaraan program ini pada tahun 2024 yaitu tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar *stakeholder* dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan OPD Pengampu urusan sosial di Kabupaten/Kota, sehingga tidak terdata dengan valid jumlah Pegawai Migran Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah yang telah terfasilitasi kepulangan dan mendapatkan rehabilitasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asal. Manfaat penyelenggaraan program warga negara migran korban tindak kekerasan yaitu tersedianya fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi ke daerah Kabupaten/Kota asal.

Program Rehabilitasi Sosial memiliki tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program rehabilitasi sosial yaitu terkait dengan SDM panti dan sarpras panti pemerintah yang kurang memadai, banyaknya pegawai pensiun termasuk tenaga juru masak di lingkungan panti menyebabkan pelayanan dan proses rehabilitasi sosial kepada penerima manfaat kurang maksimal, selain itu banyaknya gedung asrama yang rusak berat dan rusak sedang. Upaya untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan melalui strategi optimalisasi SDM yang ada serta inovasi penyedia juru masak *include* disediakan oleh pihak ketiga, terkait dengan sarpras ditempuh dengan melalui rehab gedung kantor dan asrama dengan skala prioritas. Manfaat penyelenggaraan program rehabilitasi sosial yaitu meningkatnya keberfungsian sosial dan kesejahteraan sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dalam panti.

Program Rehabilitasi Sosial didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1) *Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti* dengan keluaran 3.755 orang dengan rincian 1.655 panti pemerintah dan 2.100 panti swasta penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti sesuai target;

2) *Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti* dengan keluaran 2.800 orang anak terlantar dengan rincian 1.100 panti pemerintah dan 1.700 panti swasta yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti sesuai target.;

3) *Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti* sebanyak 1.685 orang lanjut usia terlantar dengan rincian 1.285 panti pemerintah dan 400 panti swasta yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti sesuai target;

4) *Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti* dengan keluaran 600 orang gelandangan dan pengemis dengan rincian 350 panti pemerintah dan 250 panti swasta yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti sesuai target;

5) *Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti* dengan keluaran 220 orang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti sesuai target.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki indikator dengan tingkat capaian seluruhnya sangat tinggi.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1) *Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi* dengan keluaran bantuan jaminan sosial kepada 12.764 orang melalui Program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan 78.000 orang penerima bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian Sosial sebanyak 10.000 orang melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin. Permasalahan yang dihadapi antara lain Kendala dalam penyelenggaraan program ini yaitu rendahnya serapan Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJS) yang disebabkan oleh faktor regulasi serta Kendala dalam penyelenggaraan program KUBE Fakir Miskin yaitu Pendampingan KUBE yang belum optimal, anggota KUBE belum mampu mengelola dan mengembangkan bantuan dengan baik. Upaya untuk

mengatasinya rendahnya serapan Banjamsos KJS dengan melakukan revisi Pergub dan telah disahkannya Pergub Jateng Nomor 13 Tahun 2024 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera yang secara substantif dilakukan bahwa KJS bukan Bansos sehingga penggantian calon penerima bantuan dapat dilakukan cepat tidak menunggu perubahan anggaran. Upaya untuk mengatasi pendampingan KUBE yang belum optimal dengan melakukan bimbingan teknis pendamping KUBE. Manfaat dari kegiatan ini yaitu tersedianya bantuan yang dapat mengurangi beban pengeluaran bagi PPKS non produktif di Jawa Tengah, meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian ekonomi produktif fakir miskin di Jawa Tengah melalui Program KUBE Fakir Miskin.

2) *Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal* dengan keluaran 200 dokumen rekomendasi pengangkatan anak. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu seringnya terjadi mutasi petugas Kabupaten/Kota sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman petugas dalam memahami persyaratan pengangkatan anak. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan petugas pelaksana di Kabupaten/ Kota terkait teknis pengangkatan anak. Manfaat yang diperoleh yaitu terfasilitasinya pengangkatan anak melalui sidang tim Permohonan Izin Pengangkatan Anak Provinsi Jawa Tengah.

Program Penanganan Bencana memiliki indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi. Kendala dalam program ini yaitu ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bencana masih belum optimal. Upaya mengatasi permasalahan tersebut yaitu koordinasi dan konsolidasi lintas sektor guna optimalisasi penanganan bencana khususnya kelompok rentan. Manfaat penyelenggaraan program penanganan bencana yaitu tertanganinya korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa tanggap darurat.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan memiliki indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi. Kendala dalam penyelenggaraan program pengelolaan taman makam pahlawan yaitu sarana dan prasarana pemakaman dan pertamanan rusak atau kurang layak. Upaya untuk mengatasinya yaitu memelihara dan memperbaiki sarana dan fasilitas yang ada secara maksimal. Manfaat penyelenggaraan program ini yaitu perintis kemerdekaan mendapatkan perhatian dari pemerintah, terpeliharanya TMPN secara fisik, kelayakan, dan kepatutan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara terhadap jasa-jasa para pahlawan dan sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta sebagai obyek studi dan ziarah dalam upaya meningkatkan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang Sosial meliputi:

1. Program Rehabilitasi Sosial, yang diarahkan pada peningkatan persentase penanganan PPKS yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti, dan persentase keberfungsian PPKS dalam panti;
2. Program Perlindungan dan jaminan sosial, yang diarahkan pada peningkatan persentase penanganan Sosial terhadap korban bencana dan PPKS Non Produktif.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2020-2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendapatan						60.000	92.097	116.347	197.741	228.110
2	Belanja						205.369.176	217.396.082	354.959.157	366.484.983	383.214.578
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-					

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi AnggaranTahun/Sampai Dengan Tahun (Rp.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	13	14	15	16	17
1	Pendapatan						103.260	109.340	151.992	194.092	229.047
2	Belanja						195.080.180	207.293.980	333.312.158	354.366.430	377.499.040
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-					

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan						172%	119%	131%	98,15%	100,41%	41,28%	22,65%
2	Belanja						94,99%	95,35%	93,90%	96,69%	98,51%	19,23%	19,97%
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-							

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dibanding dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (tahun 2024) seluruh program tercapai bahkan terdapat program yang melampaui target pada program perlindungan dan jaminan sosial, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan dari negara bagian Queensland dan melaksanakan penyaluran BLT BHCHT dan BLT DID.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa penentu keberhasilan capaian program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

1. Ketersediaan anggaran dan potensi sumber pembiayaan alternatif;
2. Sarana dan prasarana serta SDM pada lembaga Kesejahteraan Sosial;
3. Norma dan Regulasi serta Peraturan pendukung dalam penanganan PPKS; dan
4. Kemampuan keuangan daerah.

2.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menghadapi permasalahan baik pada tingkat strategis maupun operasional. Adapun permasalahan tersebut diurai dalam tabel 2.8 yaitu:

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih tingginya populasi PPKS	Rehabilitasi Sosial PPKS Dalam Panti Belum optimal	1. Ketersediaan sarpras Panti belum memadai 2. Kompetensi SDM Panti belum memadai 3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar PM Panti belum memadai
		Belum terpenuhinya Jaminan Sosial Bagi PPKS yang layak dan tepat sasaran	1. Data sasaran penanganan PPKS yang tersedia belum valid 2. Pendampingan sosial belum optimal
		Belum Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban	1. Belum Tercukupinya Pemenuhan Logistik Bencana 2. Belum Optimalnya Pendampingan Psikososial

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Bencana pada saat Tanggap Darurat	3. Kurangnya Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
		Kurangnya Kemandirian Sosial PPKS yang berkualitas	1. Ketersediaaan Data Sasaran Program PPKS yang tersedia belum valid 2. Konsistensi pendampingan PPKS belum optimal 3. PPKS belum mampu mengelola bantuan dengan baik
		Kurangnya peran serta PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1. Sarpras Operasional belum memadai 2. Bimbingan teknis pekerjaan sosial bagi PSKS belum optimal 3. Kurangnya kemitraan dengan dunia usaha 4. Kurangnya peran serta pihak luar dalam penanaman nilai Kepahlawanan dan Keperintisan serta Kesetiakawan Sosial

Perkembangan Populasi PPKS dari tahun 2019 s.d. tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini

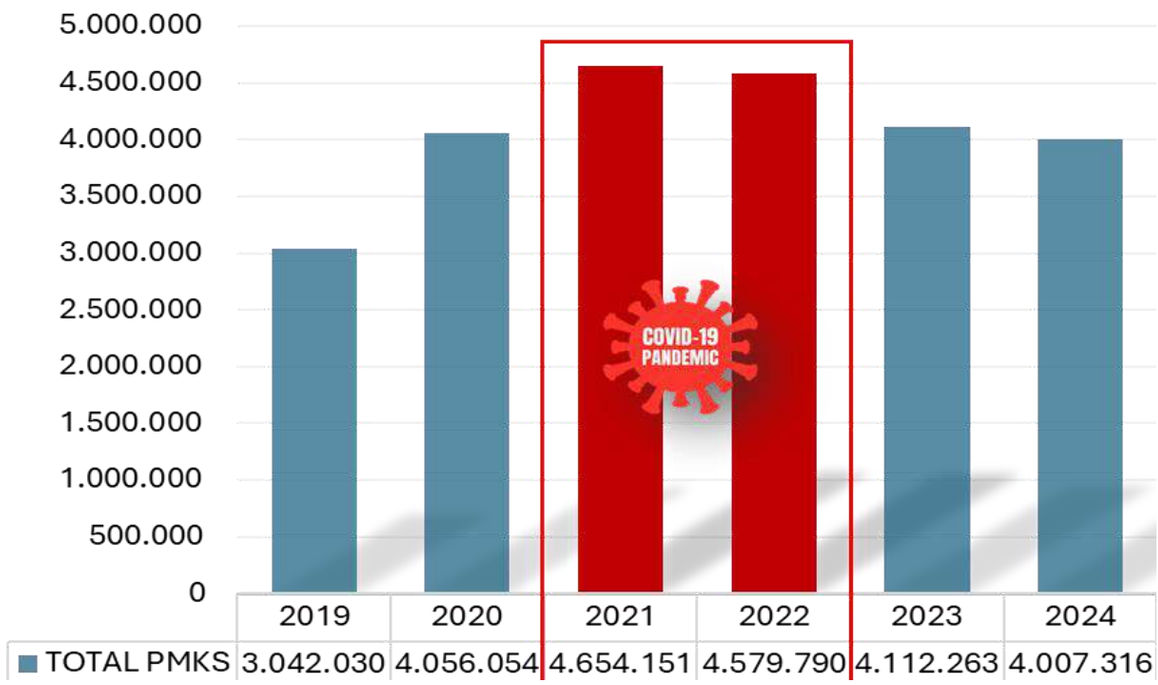

Gambar 2.3. Populasi PPKS 2019 - 2024

Pada tahun 2020 terdapat peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan, dimana sebelumnya untuk PPKS Fakir Miskin dihitung dengan satuan keluarga, pada tahun 2020 perhitungan PPKS fakir miskin menggunakan satuan orang.

Keterjadian bencana non alam Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap peningkatan populasi PPKS. Pandemi Covid-19 yang melanda tidak hanya berdampak bagi kesehatan tetapi juga kelangsungan pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh PPKS. Jika pada situasi normal mereka masih bisa menghasilkan pendapatan meskipun dalam jumlah kecil, pada situasi pandemi, kehidupan semakin terpuruk akibat hilangnya pendapatan. Tekanan yang paling dirasakan dampaknya adalah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari keluarga. Ketika pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari mengalami kesulitan maka dampaknya juga pada tertanggunya status gizi keluarga. Banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan jumlah hutang yang mengalami peningkatan. Pandemi covid-19 juga mengakibatkan usaha yang dijalankan oleh sebagian masyarakat mengalami kemunduran. Penurunan usaha maupun hilangnya pekerjaan menyebabkan tidak adanya pemasukan, hal ini mengakibatkan meningkatnya populasi PPKS.

Pada tanggal 21 Juni 2023 status Pandemi Covid resmi dicabut oleh Pemerintah, Pasca dicabutnya status Pandemi Covid, maka dilakukan program-program pemulihan dampak pandemi covid selain perlunya identifikasi permasalahan-permasalahan dan isu strategis yang mempengaruhi kondisi perkembangan populasi PPKS khususnya di Jawa Tengah

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Secara definisi isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan sehingga memerlukan perhatian khusus serta harus ditangani dengan pendekatan strategis agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Sosial maka diidentifikasi isu strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2.9

Perumusan Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	**Permasalahan Perangkat Daerah**	**Isu KLHS yang relevan dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah**	**Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah**			**Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah**
			Global	**Nasional**	**Regional**	
1	2	3	4	5	6	7
1) Rehabilitasi Sosial PPKS dalam Panti berdasarkan Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 2) Perlindungan Sosial bagi korban bencana alam dan sosial, serta kelompok yang memerlukan perlindungan khusus 3) Pemberdayaan PPKS dengan pengembangan usaha kecil menengah untuk meningkatkan kemandirian PPKS 4) Pemberdayaan Sosial Masyarakat berbasis gotong royong untuk penyelenggaraaan Kesejahteraan Sosial	1) Rehabilitasi Sosial PPKS Dalam Panti Belum Memenuhi Standar Kualitas SPM 2) Belum terpenuhinya Jaminan Sosial Bagi PPKS yang layak dan tepat sasaran 3) Belum Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana pada saat Tanggap Darurat 4) Kurangnya Kemandirian Sosial PPKS yang berkualitas 5) Kurangnya peran serta PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1) Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif 2) Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim	Kemiskinan	**Isu sosial**: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	1) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang belum optimal 2) Beban Pengeluaran PPKS bertambah 3) Rendahnya pendapatan PPKS 4) Tata Kelola Kelembagaan yang perlu ditingkatkan 5) Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah yang perlu ditingkatkan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atas pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah "Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan".

Dalam rangka pencapaian sasaran ke-3 Provinsi Jawa Tengah, yaitu "Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter", Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan yang akan dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, yaitu:

1. Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintergritas dan Dinamis.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan sasaran jangka menengah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sasaran jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Fakir Miskin;
3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah.

Secara rinci tujuan, sasaran, serta indikator kinerja dan target sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	10,95	10,67	10,13	10,01	9,7	9,44	8,7	8,36	8,36
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	0	0	0	8,88	17,76	26,64	35,52	44,4	44,4
		Menurunnya Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Fakir Miskin	Persentase Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Fakir Miskin	%	10,19	9,96	9,6	9,48	9,17	8,91	8,59	8,27	8,27
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintergritas dan Dinamis di Dinas Sosial		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Sosial	Angka	0	80,95	81	81,25	81,5	81,75	82	82,25	82,25

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Sosial	Angka	0	88,5	88,75	89	89,25	89,5	89,75	90	90
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Sosial	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Sosial	Angka	0	3,028	3,05	3,075	3,1	3,125	3,15	3,175	3,175

Penetapan tujuan diatas merupakan upaya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam hal ini Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) yang sudah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan selaras dengan Sasaran Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 yakni Sistem Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif dimana Ikesos sebagai indikator kinerjanya. Ikesos juga merupakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Urusan Sosial Pemerintahan Daerah.

Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan ukuran keberhasilan secara menyeluruh atas program pembangunan nasional yang telah dijalankan dan menerjemahkan visi Kementerian Sosial terkait perlindungan sepanjang hayat. Ikesos menerjemahkan amanat RPJPN yang diturunkan melalui RPJMN terkait urusan sosial. Ikesos diharapkan dapat mengukur dan menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, melalui tiga dimensi utama: Kebutuhan Dasar, Peranan Sosial, dan Keberdayaan Ekonomi. Tidak hanya sebagai alat ukur, indeks ini dapat menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif.

Tabel 3.2. Target Indeks Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	n/a	57,23	58,81	61,38	63,95	66,52	68,52	68,52

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah:

1. Meningkatkan Pendapatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2. Mengurangi Beban Pengeluaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

3. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Meningkatkan pengelolaan resiko; dan
5. Meningkatkan tata kelola kelembagaan.

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman yang ditetapkan dalam melakukan setiap aktivitas dan kegiatan yang akan dilakukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kemandirian Sosial melalui Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam upaya peningkatan *sustainable livelihood* bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan melalui Peningkatan Koordinasi antar *stakeholder*;
3. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejaheraan Sosial (PPKS) melalui bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan;
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejaheraan Sosial (PPKS) dalam Panti (Pemerintah dan Swasta) secara holistik, sistematis dan terstandar;
5. Meningkatkan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan *Basic Need Access* bagi Pemerlu Pelayanan Kesejaheraan Sosial (PPKS) Non Produktif melalui Kartu Jateng Ngopeni (KaJeN);
6. Peningkatan penanganan korban bencana alam dan sosial melalui penyediaan logistik bencana yang memadai, pendampingan psikososial dan penanganan khusus kelompok rentan;
7. Meningkatkan peran serta masyarakat/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta fasilitasi pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos);
8. Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial di 35 Kabupaten/Kota;
9. Meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah; dan
10. Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan dalam upaya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan daerah.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Menurunnya Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Fakir Miskin	Meningkatkan Pendapatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	a. Penguatan Kemandirian Sosial melalui Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam upaya peningkatan *sustainable livelihood* bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) b. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan melalui Peningkatan Koordinasi antar *stakeholder* c. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejaheraan Sosial (PPKS) melalui

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Mengurangi Beban Pengeluaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	a. Peningkatan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejaheraan Sosial (PPKS) dalam Panti (Pemerintah dan Swasta) secara holistik, sistematis dan terstandar b. Meningkatkan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan *Basic Need Access* bagi Pemerlu Pelayanan Kesejaheraan Sosial (PPKS) Non Produktif melalui Kartu Jateng Ngopeni (KaJeN) c. Peningkatan penanganan korban bencana alam dan sosial melalui penyediaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			logistik bencana yang memadai, pendampingan psikososial dan penanganan khusus kelompok rentan
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	a. Meningkatkan peran serta masyarakat/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta fasilitasi pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) b. Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial di 35 Kabupaten/Kota
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintergritas dan Dinamis di Dinas Sosial	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Sosial	Meningkatkan Pengelolaan Risiko	Meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Sosial	Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan	Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan dalam upaya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan daerah

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Pengelolaan risiko strategis perangkat daerah ini bertujuan mengendalikan risiko–risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Manajemen Risiko Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Penerima Manfaat saat verval tidak sesuai dengan kriteria	12	Perbedaan proses Verval DT Jateng tidak masuk prioritas P1-P3, atau DTSEN tidak termasuk kategori D1-D4	Belum semua PPKS non produktif yang masuk kategori penerima bantuan tertangani	Melaksanakan pemantauan penyaluran jaminan sosial di Kabupaten/Kota	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Tahun 2025-2029
Menurunnya Populasi PPKS Fakir Miskin	Persentase PPKS Fakir Miskin	Populasi PPKS tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	12	Lemahnya sistem pendataan dan verifikasi	Intervensi tidak tepat sasaran	Meningkatkan Verifikasi dan Validasi Data secara berkala	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Tahun 2025-2029

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif berdasarkan penentuan program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 tertuang dalam tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dibawah ini:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Baseline Tahun 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Menurunkan Populasi PPKS *												192.811.330.800		192.811.330.800		192.811.330.800		192.811.330.800		192.811.330.800	Dinas Sosial	
							Persentase Populasi PPKS *	%	10,67	10,13	10,01		9,7		9,44		8,7		8,36		Dinas Sosial	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) **											146.293.052.800		146.293.052.800		146.293.052.800		146.293.052.800		146.293.052.800	Dinas Sosial	
							Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya **	%	100	100	100	146.293.052.800	100	146.293.052.800	100	146.293.052.800	100	146.293.052.800	100	146.293.052.800	Dinas Sosial	
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN ***									200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terfasilitasinya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan ***	%	0	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		1.06.03.1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal ****								200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terfasilitasinya penanganan bagi Warga negara migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal ****	Orang	0	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.03.1.01.0003			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	0	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									7.484.875.000		7.484.875.000		7.484.875.000		7.484.875.000		7.484.875.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti ***	%	0	100	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								3.382.750.000		3.382.750.000		3.382.750.000		3.382.750.000		3.382.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan reahabilitasi di dalam Panti ****	Orang	0	2100	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							2.982.750.000		2.982.750.000		2.982.750.000		2.982.750.000		2.982.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	2100	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	20	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****								2.471.750.000		2.471.750.000		2.471.750.000		2.471.750.000		2.471.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti ****	Orang	0	1700	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							2.371.750.000		2.371.750.000		2.371.750.000		2.371.750.000		2.371.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	1700	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								711.000.000		711.000.000		711.000.000		711.000.000		711.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti ****	Orang	0	400	400	711.000.000	400	711.000.000	400	711.000.000	400	711.000.000	400	711.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	

		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							611.000.000		611.000.000		611.000.000		611.000.000		611.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	400	400	611.000.000	400	611.000.000	400	611.000.000	400	611.000.000	400	611.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti ****							919.375.000		919.375.000		919.375.000		919.375.000		919.375.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti ****	Orang	0	250	250	919.375.000	250	919.375.000	250	919.375.000	250	919.375.000	250	919.375.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan *****							419.375.000		419.375.000		419.375.000		419.375.000		419.375.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	250	250	419.375.000	250	419.375.000	250	419.375.000	250	419.375.000	250	419.375.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti *****							500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti ***	%	0	100	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
		1.06.05.1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal ****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						terfalilitasinya penerbitan rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan ****	Dokumen	0	200	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.05.1.01.0001			Pengangkatan Anak antar WNI *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti ***	%	0	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****							3.382.750.000		3.382.750.000		3.382.750.000		3.382.750.000		3.382.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan reahabilitasi di dalam Panti ****	Orang	0	2100	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							2.982.750.000		2.982.750.000		2.982.750.000		2.982.750.000		2.982.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	2100	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	20	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****							2.471.750.000		2.471.750.000		2.471.750.000		2.471.750.000		2.471.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti ****	Orang	0	1700	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							2.371.750.000		2.371.750.000		2.371.750.000		2.371.750.000		2.371.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	1700	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	

						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								711.000.000		711.000.000		711.000.000		711.000.000		711.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti ****	Orang	0	400	400	711.000.000	400	711.000.000	400	711.000.000	400	711.000.000	400	711.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							611.000.000		611.000.000		611.000.000		611.000.000		611.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	400	400	611.000.000	400	611.000.000	400	611.000.000	400	611.000.000	400	611.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti ****								919.375.000		919.375.000		919.375.000		919.375.000		919.375.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti ****	Orang	0	250	250	919.375.000	250	919.375.000	250	919.375.000	250	919.375.000	250	919.375.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan *****							419.375.000		419.375.000		419.375.000		419.375.000		419.375.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	250	250	419.375.000	250	419.375.000	250	419.375.000	250	419.375.000	250	419.375.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti *****							500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti ***	%	0	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
		1.06.05.1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal ****								300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						terfailitasinya penerbitan rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan ****	Dokumen	0	200	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.05.1.01.0001			Pengangkatan Anak antar WNI *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									2.205.640.000		2.205.640.000		2.205.640.000		2.205.640.000		2.205.640.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	2.205.640.000	100	2.205.640.000	100	2.205.640.000	100	2.205.640.000	100	2.205.640.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								718.920.000		718.920.000		718.920.000		718.920.000		718.920.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar pada PPS Mardi Utomo	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo ****	Orang	0	50	50	718.920.000	50	718.920.000	50	718.920.000	50	718.920.000	50	718.920.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****							88.770.000		88.770.000		88.770.000		88.770.000		88.770.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	88.770.000	50	88.770.000	50	88.770.000	50	88.770.000	50	88.770.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							24.700.000		24.700.000		24.700.000		24.700.000		24.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	24.700.000	50	24.700.000	50	24.700.000	50	24.700.000	50	24.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	

						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****						43.500.000		43.500.000		43.500.000		43.500.000		43.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	43.500.000	50	43.500.000	50	43.500.000	50	43.500.000	50	43.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****						7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****						17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	17.500.000	50	17.500.000	50	17.500.000	50	17.500.000	50	17.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****						3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****						3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas *****						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****						7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	8	8	7.500.000	8	7.500.000	8	7.500.000	8	7.500.000	8	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti ****							1.486.720.000		1.486.720.000		1.486.720.000		1.486.720.000		1.486.720.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis pada PPS Mardi Utomo	Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo ****	Orang	0	110	110	1.486.720.000	110	1.486.720.000	110	1.486.720.000	110	1.486.720.000	110	1.486.720.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan *****						1.113.750.000		1.113.750.000		1.113.750.000		1.113.750.000		1.113.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	1.113.750.000	110	1.113.750.000	110	1.113.750.000	110	1.113.750.000	110	1.113.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang *****						191.510.000		191.510.000		191.510.000		191.510.000		191.510.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	191.510.000	110	191.510.000	110	191.510.000	110	191.510.000	110	191.510.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses *****						35.860.000		35.860.000		35.860.000		35.860.000		35.860.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	35.860.000	110	35.860.000	110	35.860.000	110	35.860.000	110	35.860.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.04.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****						13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	13.200.000	110	13.200.000	110	13.200.000	110	13.200.000	110	13.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****						7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	7.200.000	110	7.200.000	110	7.200.000	110	7.200.000	110	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.04.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****						7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	7.200.000	110	7.200.000	110	7.200.000	110	7.200.000	110	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.04.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar *****						73.000.000		73.000.000		73.000.000		73.000.000		73.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	73.000.000	110	73.000.000	110	73.000.000	110	73.000.000	110	73.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****						5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	

						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	5.500.000	110	5.500.000	110	5.500.000	110	5.500.000	110	5.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal *****						16.500.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	16.500.000	110	16.500.000	110	16.500.000	110	16.500.000	110	16.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti *****						22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	22.000.000	4	22.000.000	4	22.000.000	4	22.000.000	4	22.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04.1.04.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis *****						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	1.000.000	110	1.000.000	110	1.000.000	110	1.000.000	110	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***								2.917.810.000		2.917.810.000		2.917.810.000		2.917.810.000		2.917.810.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	2.917.810.000	100	2.917.810.000	100	2.917.810.000	100	2.917.810.000	100	2.917.810.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****							1.036.690.000		1.036.690.000		1.036.690.000		1.036.690.000		1.036.690.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial anak terlantar pada PPS Mandiri	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri ****	Orang	0	50	50	1.036.690.000	50	1.036.690.000	50	1.036.690.000	50	1.036.690.000	50	1.036.690.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan *****						750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	750.000	50	750.000	50	750.000	50	750.000	50	750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang *****						124.300.000		124.300.000		124.300.000		124.300.000		124.300.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	124.300.000	50	124.300.000	50	124.300.000	50	124.300.000	50	124.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****						22.300.000		22.300.000		22.300.000		22.300.000		22.300.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	22.300.000	50	22.300.000	50	22.300.000	50	22.300.000	50	22.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****						107.800.000		107.800.000		107.800.000		107.800.000		107.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	107.800.000	50	107.800.000	50	107.800.000	50	107.800.000	50	107.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****						7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****						175.350.000		175.350.000		175.350.000		175.350.000		175.350.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	175.350.000	50	175.350.000	50	175.350.000	50	175.350.000	50	175.350.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****						30.240.000		30.240.000		30.240.000		30.240.000		30.240.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	30.240.000	50	30.240.000	50	30.240.000	50	30.240.000	50	30.240.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****						506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****						36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	36.000.000	4	36.000.000	4	36.000.000	4	36.000.000	4	36.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri

		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	2.000.000	50	2.000.000	50	2.000.000	50	2.000.000	50	2.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti *****							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	9.000.000	50	9.000.000	50	9.000.000	50	9.000.000	50	9.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								1.881.120.000		1.881.120.000		1.881.120.000		1.881.120.000		1.881.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar pada PPS Mandiri	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri ****	Orang	0	120	120	1.881.120.000	120	1.881.120.000	120	1.881.120.000	120	1.881.120.000	120	1.881.120.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							1.251.000.000		1.251.000.000		1.251.000.000		1.251.000.000		1.251.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	1.251.000.000	120	1.251.000.000	120	1.251.000.000	120	1.251.000.000	120	1.251.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang *****							362.640.000		362.640.000		362.640.000		362.640.000		362.640.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	362.640.000	120	362.640.000	120	362.640.000	120	362.640.000	120	362.640.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							59.280.000		59.280.000		59.280.000		59.280.000		59.280.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	59.280.000	120	59.280.000	120	59.280.000	120	59.280.000	120	59.280.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial *****							10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	10.800.000	120	10.800.000	120	10.800.000	120	10.800.000	120	10.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							106.500.000		106.500.000		106.500.000		106.500.000		106.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	106.500.000	120	106.500.000	120	106.500.000	120	106.500.000	120	106.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	7.200.000	120	7.200.000	120	7.200.000	120	7.200.000	120	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	9.000.000	120	9.000.000	120	9.000.000	120	9.000.000	120	9.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	9.000.000	120	9.000.000	120	9.000.000	120	9.000.000	120	9.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan *****							27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	18	18	27.000.000	18	27.000.000	18	27.000.000	18	27.000.000	18	27.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	1.000.000	120	1.000.000	120	1.000.000	120	1.000.000	120	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar *****							13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	13.200.000	120	13.200.000	120	13.200.000	120	13.200.000	120	13.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	4	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Mandiri
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									4.027.580.000		4.027.580.000		4.027.580.000		4.027.580.000		4.027.580.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	4.027.580.000	100	4.027.580.000	100	4.027.580.000	100	4.027.580.000	100	4.027.580.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****								2.593.640.000		2.593.640.000		2.593.640.000		2.593.640.000		2.593.640.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	

						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial anak terlantar pada PPS Wira Adhi Karya	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya ****	Orang	0	100	100	2.593.640.000	100	2.593.640.000	100	2.593.640.000	100	2.593.640.000	100	2.593.640.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan *****							750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	750.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang *****							299.840.000		299.840.000		299.840.000		299.840.000		299.840.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	299.840.000	100	299.840.000	100	299.840.000	100	299.840.000	100	299.840.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							44.600.000		44.600.000		44.600.000		44.600.000		44.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	44.600.000	100	44.600.000	100	44.600.000	100	44.600.000	100	44.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							132.800.000		132.800.000		132.800.000		132.800.000		132.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	132.800.000	100	132.800.000	100	132.800.000	100	132.800.000	100	132.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							14.400.000		14.400.000		14.400.000		14.400.000		14.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	14.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							1.998.000.000		1.998.000.000		1.998.000.000		1.998.000.000		1.998.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	1.998.000.000	100	1.998.000.000	100	1.998.000.000	100	1.998.000.000	100	1.998.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	39.000.000	4	39.000.000	4	39.000.000	4	39.000.000	4	39.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti *****							9.750.000		9.750.000		9.750.000		9.750.000		9.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	9.750.000	100	9.750.000	100	9.750.000	100	9.750.000	100	9.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								1.433.940.000		1.433.940.000		1.433.940.000		1.433.940.000		1.433.940.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar pada PPS Wira Adhi Karya	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya ****	Orang	0	90	90	1.433.940.000	90	1.433.940.000	90	1.433.940.000	90	1.433.940.000	90	1.433.940.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							938.250.000		938.250.000		938.250.000		938.250.000		938.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	938.250.000	90	938.250.000	90	938.250.000	90	938.250.000	90	938.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang *****							271.980.000		271.980.000		271.980.000		271.980.000		271.980.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	271.980.000	90	271.980.000	90	271.980.000	90	271.980.000	90	271.980.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							44.460.000		44.460.000		44.460.000		44.460.000		44.460.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	

						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	44.460.000	90	44.460.000	90	44.460.000	90	44.460.000	90	44.460.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial *****							8.100.000		8.100.000		8.100.000		8.100.000		8.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	8.100.000	90	8.100.000	90	8.100.000	90	8.100.000	90	8.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							99.000.000		99.000.000		99.000.000		99.000.000		99.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	99.000.000	90	99.000.000	90	99.000.000	90	99.000.000	90	99.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	7.200.000	90	7.200.000	90	7.200.000	90	7.200.000	90	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							6.750.000		6.750.000		6.750.000		6.750.000		6.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	6.750.000	90	6.750.000	90	6.750.000	90	6.750.000	90	6.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							6.750.000		6.750.000		6.750.000		6.750.000		6.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	6.750.000	90	6.750.000	90	6.750.000	90	6.750.000	90	6.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan *****							20.250.000		20.250.000		20.250.000		20.250.000		20.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	14	14	20.250.000	14	20.250.000	14	20.250.000	14	20.250.000	14	20.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	1.000.000	90	1.000.000	90	1.000.000	90	1.000.000	90	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar *****							11.700.000		11.700.000		11.700.000		11.700.000		11.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	11.700.000	90	11.700.000	90	11.700.000	90	11.700.000	90	11.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	4	4	18.000.000	4	18.000.000	4	18.000.000	4	18.000.000	4	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya SEMARANG
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									3.280.956.800		3.280.956.800		3.280.956.800		3.280.956.800		3.280.956.800	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	3.280.956.800	100	3.280.956.800	100	3.280.956.800	100	3.280.956.800	100	3.280.956.800	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								3.280.956.800		3.280.956.800		3.280.956.800		3.280.956.800		3.280.956.800	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Meningkatnya kualitas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar pada PPS Ngudi Rahayu	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu ****	Orang	0	240	240	3.280.956.800	240	3.280.956.800	240	3.280.956.800	240	3.280.956.800	240	3.280.956.800	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							2.430.000.000		2.430.000.000		2.430.000.000		2.430.000.000		2.430.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	240	240	2.430.000.000	240	2.430.000.000	240	2.430.000.000	240	2.430.000.000	240	2.430.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****							426.096.800		426.096.800		426.096.800		426.096.800		426.096.800	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	240	240	426.096.800	240	426.096.800	240	426.096.800	240	426.096.800	240	426.096.800	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							118.560.000		118.560.000		118.560.000		118.560.000		118.560.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	240	240	118.560.000	240	118.560.000	240	118.560.000	240	118.560.000	240	118.560.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							21.600.000		21.600.000		21.600.000		21.600.000		21.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	240	240	21.600.000	240	21.600.000	240	21.600.000	240	21.600.000	240	21.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu

		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							72.000.000		72.000.000		72.000.000		72.000.000		72.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	240	240	72.000.000	240	72.000.000	240	72.000.000	240	72.000.000	240	72.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	240	240	7.200.000	240	7.200.000	240	7.200.000	240	7.200.000	240	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							84.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	240	240	84.000.000	240	84.000.000	240	84.000.000	240	84.000.000	240	84.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	36	36	18.000.000	36	18.000.000	36	18.000.000	36	18.000.000	36	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	24	24	18.000.000	24	18.000.000	24	18.000.000	24	18.000.000	24	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	24	24	1.000.000	24	1.000.000	24	1.000.000	24	1.000.000	24	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****							36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	24	24	36.000.000	24	36.000.000	24	36.000.000	24	36.000.000	24	36.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	4	4	48.000.000	4	48.000.000	4	48.000.000	4	48.000.000	4	48.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									2.179.240.000		2.179.240.000		2.179.240.000		2.179.240.000		2.179.240.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	2.179.240.000	100	2.179.240.000	100	2.179.240.000	100	2.179.240.000	100	2.179.240.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								2.179.240.000		2.179.240.000		2.179.240.000		2.179.240.000		2.179.240.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar pada PPS Cepiring	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring ****	Orang	0	140	140	2.179.240.000	140	2.179.240.000	140	2.179.240.000	140	2.179.240.000	140	2.179.240.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							1.459.500.000		1.459.500.000		1.459.500.000		1.459.500.000		1.459.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	1.459.500.000	100	1.459.500.000	100	1.459.500.000	100	1.459.500.000	100	1.459.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KENDAL Panti Pelayanan Sosial Cepiring
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang *****							423.080.000		423.080.000		423.080.000		423.080.000		423.080.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	423.080.000	100	423.080.000	100	423.080.000	100	423.080.000	100	423.080.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KENDAL Panti Pelayanan Sosial Cepiring
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							69.160.000		69.160.000		69.160.000		69.160.000		69.160.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	69.160.000	100	69.160.000	100	69.160.000	100	69.160.000	100	69.160.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KENDAL Panti Pelayanan Sosial Cepiring
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KENDAL Panti Pelayanan Sosial Cepiring
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial *****							12.600.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	12.600.000	100	12.600.000	100	12.600.000	100	12.600.000	100	12.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KENDAL Panti Pelayanan Sosial Cepiring
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							111.500.000		111.500.000		111.500.000		111.500.000		111.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	111.500.000	100	111.500.000	100	111.500.000	100	111.500.000	100	111.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KENDAL Panti Pelayanan Sosial Cepiring
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KENDAL Panti Pelayanan Sosial Cepiring

		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KENDAL Panti Pelayanan Sosial Cepiring
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KENDAL Panti Pelayanan Sosial Cepiring
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan *****							31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	15	15	31.500.000	15	31.500.000	15	31.500.000	15	31.500.000	15	31.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KENDAL Panti Pelayanan Sosial Cepiring
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KENDAL Panti Pelayanan Sosial Cepiring
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar *****							14.200.000		14.200.000		14.200.000		14.200.000		14.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	14.200.000	100	14.200.000	100	14.200.000	100	14.200.000	100	14.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KENDAL Panti Pelayanan Sosial Cepiring
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	4	4	28.000.000	4	28.000.000	4	28.000.000	4	28.000.000	4	28.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KENDAL Panti Pelayanan Sosial Cepiring
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									2.253.770.000		2.253.770.000		2.253.770.000		2.253.770.000		2.253.770.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	2.253.770.000	100	2.253.770.000	100	2.253.770.000	100	2.253.770.000	100	2.253.770.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								2.253.770.000		2.253.770.000		2.253.770.000		2.253.770.000		2.253.770.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Meningkatkan penanganan PPKS dalam Panti sesuai SPM bidang sosial	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede ****	Orang	0	100	100	2.253.770.000	100	2.253.770.000	100	2.253.770.000	100	2.253.770.000	100	2.253.770.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							1.511.625.000		1.511.625.000		1.511.625.000		1.511.625.000		1.511.625.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	145	145	1.511.625.000	145	1.511.625.000	145	1.511.625.000	145	1.511.625.000	145	1.511.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Turusgede REMBANG
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang *****							438.190.000		438.190.000		438.190.000		438.190.000		438.190.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	145	145	438.190.000	145	438.190.000	145	438.190.000	145	438.190.000	145	438.190.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Turusgede REMBANG
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							71.630.000		71.630.000		71.630.000		71.630.000		71.630.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	145	145	71.630.000	145	71.630.000	145	71.630.000	145	71.630.000	145	71.630.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Turusgede REMBANG
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	145	145	500.000	145	500.000	145	500.000	145	500.000	145	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Turusgede REMBANG
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial *****							13.050.000		13.050.000		13.050.000		13.050.000		13.050.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	145	145	13.050.000	145	13.050.000	145	13.050.000	145	13.050.000	145	13.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Turusgede REMBANG
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							112.750.000		112.750.000		112.750.000		112.750.000		112.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	145	145	112.750.000	145	112.750.000	145	112.750.000	145	112.750.000	145	112.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Turusgede REMBANG
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	145	145	7.200.000	145	7.200.000	145	7.200.000	145	7.200.000	145	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Turusgede REMBANG
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							10.875.000		10.875.000		10.875.000		10.875.000		10.875.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	145	145	10.875.000	145	10.875.000	145	10.875.000	145	10.875.000	145	10.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Turusgede REMBANG
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							10.875.000		10.875.000		10.875.000		10.875.000		10.875.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	145	145	10.875.000	145	10.875.000	145	10.875.000	145	10.875.000	145	10.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Turusgede REMBANG
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan *****							32.625.000		32.625.000		32.625.000		32.625.000		32.625.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	22	22	32.625.000	22	32.625.000	22	32.625.000	22	32.625.000	22	32.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Turusgede REMBANG

		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	145	145	1.000.000	145	1.000.000	145	1.000.000	145	1.000.000	145	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Turusgede REMBANG
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar *****							14.450.000		14.450.000		14.450.000		14.450.000		14.450.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	145	145	14.450.000	145	14.450.000	145	14.450.000	145	14.450.000	145	14.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Turusgede REMBANG
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							29.000.000		29.000.000		29.000.000		29.000.000		29.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	145	145	29.000.000	145	29.000.000	145	29.000.000	145	29.000.000	145	29.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Turusgede REMBANG
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									2.741.580.000		2.741.580.000		2.741.580.000		2.741.580.000		2.741.580.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	2.741.580.000	100	2.741.580.000	100	2.741.580.000	100	2.741.580.000	100	2.741.580.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								2.741.580.000		2.741.580.000		2.741.580.000		2.741.580.000		2.741.580.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Meningkatkan penanganan PPKS dalam Panti sesuai SPM bidang sosial	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo ****	Orang	0	100	100	2.741.580.000	100	2.741.580.000	100	2.741.580.000	100	2.741.580.000	100	2.741.580.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							2.025.000.000		2.025.000.000		2.025.000.000		2.025.000.000		2.025.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	2.025.000.000	200	2.025.000.000	200	2.025.000.000	200	2.025.000.000	200	2.025.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****							355.080.000		355.080.000		355.080.000		355.080.000		355.080.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	355.080.000	200	355.080.000	200	355.080.000	200	355.080.000	200	355.080.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo REMBANG
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							98.800.000		98.800.000		98.800.000		98.800.000		98.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	98.800.000	200	98.800.000	200	98.800.000	200	98.800.000	200	98.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo REMBANG
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	500.000	200	500.000	200	500.000	200	500.000	200	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo REMBANG
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	18.000.000	200	18.000.000	200	18.000.000	200	18.000.000	200	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo REMBANG
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	66.000.000	200	66.000.000	200	66.000.000	200	66.000.000	200	66.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo REMBANG
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	7.200.000	200	7.200.000	200	7.200.000	200	7.200.000	200	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo REMBANG
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	70.000.000	200	70.000.000	200	70.000.000	200	70.000.000	200	70.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo REMBANG
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	15.000.000	200	15.000.000	200	15.000.000	200	15.000.000	200	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo REMBANG
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	15.000.000	200	15.000.000	200	15.000.000	200	15.000.000	200	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo REMBANG
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo REMBANG
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	

						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	30	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo REMBANG
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	200	200	40.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo REMBANG
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									1.757.225.000		1.757.225.000		1.757.225.000		1.757.225.000		1.757.225.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	1.757.225.000	100	1.757.225.000	100	1.757.225.000	100	1.757.225.000	100	1.757.225.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								1.757.225.000		1.757.225.000		1.757.225.000		1.757.225.000		1.757.225.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Meningkatkan penanganan PPKS dalam Panti sesuai SPM bidang sosial	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo ****	Orang	0	125	125	1.757.225.000	125	1.757.225.000	125	1.757.225.000	125	1.757.225.000	125	1.757.225.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							1.265.625.000		1.265.625.000		1.265.625.000		1.265.625.000		1.265.625.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	125	125	1.265.625.000	125	1.265.625.000	125	1.265.625.000	125	1.265.625.000	125	1.265.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****							206.300.000		206.300.000		206.300.000		206.300.000		206.300.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	125	125	206.300.000	125	206.300.000	125	206.300.000	125	206.300.000	125	206.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KUDUS Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							59.650.000		59.650.000		59.650.000		59.650.000		59.650.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	125	125	59.650.000	125	59.650.000	125	59.650.000	125	59.650.000	125	59.650.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KUDUS Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KUDUS Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	125	125	11.250.000	125	11.250.000	125	11.250.000	125	11.250.000	125	11.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KUDUS Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							90.750.000		90.750.000		90.750.000		90.750.000		90.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	125	125	90.750.000	125	90.750.000	125	90.750.000	125	90.750.000	125	90.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KUDUS Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							14.400.000		14.400.000		14.400.000		14.400.000		14.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	125	125	14.400.000	125	14.400.000	125	14.400.000	125	14.400.000	125	14.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KUDUS Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							43.750.000		43.750.000		43.750.000		43.750.000		43.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	125	125	43.750.000	125	43.750.000	125	43.750.000	125	43.750.000	125	43.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KUDUS Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							9.375.000		9.375.000		9.375.000		9.375.000		9.375.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	125	125	9.375.000	125	9.375.000	125	9.375.000	125	9.375.000	125	9.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KUDUS Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							9.375.000		9.375.000		9.375.000		9.375.000		9.375.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	125	125	9.375.000	125	9.375.000	125	9.375.000	125	9.375.000	125	9.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KUDUS Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	125	125	2.000.000	125	2.000.000	125	2.000.000	125	2.000.000	125	2.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KUDUS Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****							18.750.000		18.750.000		18.750.000		18.750.000		18.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	9	9	18.750.000	9	18.750.000	9	18.750.000	9	18.750.000	9	18.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KUDUS Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	

						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									2.550.284.000		2.550.284.000		2.550.284.000		2.550.284.000		2.550.284.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	2.550.284.000	100	2.550.284.000	100	2.550.284.000	100	2.550.284.000	100	2.550.284.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								1.190.874.000		1.190.874.000		1.190.874.000		1.190.874.000		1.190.874.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Meningkatkan kualitas pelayanan sosial Penyandang Disabilitas Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan ****	Orang	0	85	85	1.190.874.000	85	1.190.874.000	85	1.190.874.000	85	1.190.874.000	85	1.190.874.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							860.625.000		860.625.000		860.625.000		860.625.000		860.625.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	860.625.000	85	860.625.000	85	860.625.000	85	860.625.000	85	860.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****							150.909.000		150.909.000		150.909.000		150.909.000		150.909.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	150.909.000	85	150.909.000	85	150.909.000	85	150.909.000	85	150.909.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							41.990.000		41.990.000		41.990.000		41.990.000		41.990.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	41.990.000	85	41.990.000	85	41.990.000	85	41.990.000	85	41.990.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	500.000	85	500.000	85	500.000	85	500.000	85	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							7.650.000		7.650.000		7.650.000		7.650.000		7.650.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	7.650.000	85	7.650.000	85	7.650.000	85	7.650.000	85	7.650.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							48.750.000		48.750.000		48.750.000		48.750.000		48.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	48.750.000	85	48.750.000	85	48.750.000	85	48.750.000	85	48.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	7.200.000	85	7.200.000	85	7.200.000	85	7.200.000	85	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							29.750.000		29.750.000		29.750.000		29.750.000		29.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	29.750.000	85	29.750.000	85	29.750.000	85	29.750.000	85	29.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas*****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	1.000.000	85	1.000.000	85	1.000.000	85	1.000.000	85	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****							12.750.000		12.750.000		12.750.000		12.750.000		12.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	13	13	12.750.000	13	12.750.000	13	12.750.000	13	12.750.000	13	12.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	85	85	17.000.000	85	17.000.000	85	17.000.000	85	17.000.000	85	17.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								1.359.410.000		1.359.410.000		1.359.410.000		1.359.410.000		1.359.410.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Meningkatkan kualitas pelayanan sosial Lanjut Usia Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan ****	Orang	0	85	85	1.359.410.000	85	1.359.410.000	85	1.359.410.000	85	1.359.410.000	85	1.359.410.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							886.125.000		886.125.000		886.125.000		886.125.000		886.125.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	886.125.000	85	886.125.000	85	886.125.000	85	886.125.000	85	886.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang *****							256.870.000		256.870.000		256.870.000		256.870.000		256.870.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	256.870.000	85	256.870.000	85	256.870.000	85	256.870.000	85	256.870.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							41.990.000		41.990.000		41.990.000		41.990.000		41.990.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	41.990.000	85	41.990.000	85	41.990.000	85	41.990.000	85	41.990.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	500.000	85	500.000	85	500.000	85	500.000	85	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial *****							7.650.000		7.650.000		7.650.000		7.650.000		7.650.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	7.650.000	85	7.650.000	85	7.650.000	85	7.650.000	85	7.650.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							97.750.000		97.750.000		97.750.000		97.750.000		97.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	97.750.000	85	97.750.000	85	97.750.000	85	97.750.000	85	97.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	7.200.000	85	7.200.000	85	7.200.000	85	7.200.000	85	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan *****							19.125.000		19.125.000		19.125.000		19.125.000		19.125.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	13	13	19.125.000	13	19.125.000	13	19.125.000	13	19.125.000	13	19.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	1.000.000	85	1.000.000	85	1.000.000	85	1.000.000	85	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar *****							11.450.000		11.450.000		11.450.000		11.450.000		11.450.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	11.450.000	85	11.450.000	85	11.450.000	85	11.450.000	85	11.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	4	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	JEPARA Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									2.745.320.000		2.745.320.000		2.745.320.000		2.745.320.000		2.745.320.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	2.745.320.000	100	2.745.320.000	100	2.745.320.000	100	2.745.320.000	100	2.745.320.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								716.820.000		716.820.000		716.820.000		716.820.000		716.820.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama ****	Orang	0	50	50	716.820.000	50	716.820.000	50	716.820.000	50	716.820.000	50	716.820.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****							88.770.000		88.770.000		88.770.000		88.770.000		88.770.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	88.770.000	50	88.770.000	50	88.770.000	50	88.770.000	50	88.770.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama

		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							22.600.000		22.600.000		22.600.000		22.600.000		22.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	22.600.000	50	22.600.000	50	22.600.000	50	22.600.000	50	22.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							43.500.000		43.500.000		43.500.000		43.500.000		43.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	43.500.000	50	43.500.000	50	43.500.000	50	43.500.000	50	43.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	17.500.000	50	17.500.000	50	17.500.000	50	17.500.000	50	17.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****							7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	3	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti ****								2.028.500.000		2.028.500.000		2.028.500.000		2.028.500.000		2.028.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama ****	Orang	0	150	150	2.028.500.000	150	2.028.500.000	150	2.028.500.000	150	2.028.500.000	150	2.028.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan *****							1.518.750.000		1.518.750.000		1.518.750.000		1.518.750.000		1.518.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	150	150	1.518.750.000	150	1.518.750.000	150	1.518.750.000	150	1.518.750.000	150	1.518.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang *****							276.450.000		276.450.000		276.450.000		276.450.000		276.450.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	150	150	276.450.000	150	276.450.000	150	276.450.000	150	276.450.000	150	276.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses *****							66.900.000		66.900.000		66.900.000		66.900.000		66.900.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	150	150	66.900.000	150	66.900.000	150	66.900.000	150	66.900.000	150	66.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.05.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	150	150	18.000.000	150	18.000.000	150	18.000.000	150	18.000.000	150	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							73.500.000		73.500.000		73.500.000		73.500.000		73.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	

						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	150	150	73.500.000	150	73.500.000	150	73.500.000	150	73.500.000	150	73.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.05.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****						7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	150	150	7.200.000	150	7.200.000	150	7.200.000	150	7.200.000	150	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.05.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar *****						7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	150	150	7.200.000	150	7.200.000	150	7.200.000	150	7.200.000	150	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****						7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	150	150	7.500.000	150	7.500.000	150	7.500.000	150	7.500.000	150	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal *****						22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal *****	Orang	0	150	150	22.500.000	150	22.500.000	150	22.500.000	150	22.500.000	150	22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA *****	Dokumen	0	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04.1.05.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS *****						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	150	150	500.000	150	500.000	150	500.000	150	500.000	150	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SURAKARTA Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***								4.015.180.000		4.015.180.000		4.015.180.000		4.015.180.000		4.015.180.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	4.015.180.000	100	4.015.180.000	100	4.015.180.000	100	4.015.180.000	100	4.015.180.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****							2.404.470.000		2.404.470.000		2.404.470.000		2.404.470.000		2.404.470.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti sesuai SPM	Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha ****	Orang	0	0	0	2.404.470.000	0	2.404.470.000	0	2.404.470.000	0	2.404.470.000	0	2.404.470.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****						1.771.875.000		1.771.875.000		1.771.875.000		1.771.875.000		1.771.875.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	175	175	1.771.875.000	175	1.771.875.000	175	1.771.875.000	175	1.771.875.000	175	1.771.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****						310.695.000		310.695.000		310.695.000		310.695.000		310.695.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	175	175	310.695.000	175	310.695.000	175	310.695.000	175	310.695.000	175	310.695.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****						86.450.000		86.450.000		86.450.000		86.450.000		86.450.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	175	175	86.450.000	175	86.450.000	175	86.450.000	175	86.450.000	175	86.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****						15.750.000		15.750.000		15.750.000		15.750.000		15.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	175	175	15.750.000	175	15.750.000	175	15.750.000	175	15.750.000	175	15.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****						62.250.000		62.250.000		62.250.000		62.250.000		62.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	175	175	62.250.000	175	62.250.000	175	62.250.000	175	62.250.000	175	62.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****						7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	175	175	7.200.000	175	7.200.000	175	7.200.000	175	7.200.000	175	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO

		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							61.250.000		61.250.000		61.250.000		61.250.000		61.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	175	175	61.250.000	175	61.250.000	175	61.250.000	175	61.250.000	175	61.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							13.125.000		13.125.000		13.125.000		13.125.000		13.125.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	175	175	13.125.000	175	13.125.000	175	13.125.000	175	13.125.000	175	13.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							13.125.000		13.125.000		13.125.000		13.125.000		13.125.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	175	175	13.125.000	175	13.125.000	175	13.125.000	175	13.125.000	175	13.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	175	175	1.000.000	175	1.000.000	175	1.000.000	175	1.000.000	175	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****							26.250.000		26.250.000		26.250.000		26.250.000		26.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	13	13	26.250.000	13	26.250.000	13	26.250.000	13	26.250.000	13	26.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	4	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****								1.610.710.000		1.610.710.000		1.610.710.000		1.610.710.000		1.610.710.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Maningkatnya rahabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti sesuai SPM	Jumlah anak terlantar mendapatkan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti ****	Orang	0	80	80	1.610.710.000	80	1.610.710.000	80	1.610.710.000	80	1.610.710.000	80	1.610.710.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan *****							750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	750.000	80	750.000	80	750.000	80	750.000	80	750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang *****							198.880.000		198.880.000		198.880.000		198.880.000		198.880.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	198.880.000	80	198.880.000	80	198.880.000	80	198.880.000	80	198.880.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							35.680.000		35.680.000		35.680.000		35.680.000		35.680.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	35.680.000	80	35.680.000	80	35.680.000	80	35.680.000	80	35.680.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							800.000		800.000		800.000		800.000		800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	800.000	80	800.000	80	800.000	80	800.000	80	800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							112.000.000		112.000.000		112.000.000		112.000.000		112.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	112.000.000	80	112.000.000	80	112.000.000	80	112.000.000	80	112.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	7.200.000	80	7.200.000	80	7.200.000	80	7.200.000	80	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							380.400.000		380.400.000		380.400.000		380.400.000		380.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	380.400.000	80	380.400.000	80	380.400.000	80	380.400.000	80	380.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	24.000.000	80	24.000.000	80	24.000.000	80	24.000.000	80	24.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							810.000.000		810.000.000		810.000.000		810.000.000		810.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	810.000.000	80	810.000.000	80	810.000.000	80	810.000.000	80	810.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	

						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	16.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	1.000.000	80	1.000.000	80	1.000.000	80	1.000.000	80	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti *****							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha SUKOHARJO
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									2.993.206.000		2.993.206.000		2.993.206.000		2.993.206.000		2.993.206.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	2.993.206.000	100	2.993.206.000	100	2.993.206.000	100	2.993.206.000	100	2.993.206.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								582.396.000		582.396.000		582.396.000		582.396.000		582.396.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Meningkatkan penanganan PPKS dalam Panti sesuai SPM bidang sosial	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera ****	Orang	0	40	40	582.396.000	40	582.396.000	40	582.396.000	40	582.396.000	40	582.396.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							405.000.000		405.000.000		405.000.000		405.000.000		405.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	405.000.000	40	405.000.000	40	405.000.000	40	405.000.000	40	405.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****							71.016.000		71.016.000		71.016.000		71.016.000		71.016.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	71.016.000	40	71.016.000	40	71.016.000	40	71.016.000	40	71.016.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							18.080.000		18.080.000		18.080.000		18.080.000		18.080.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	18.080.000	40	18.080.000	40	18.080.000	40	18.080.000	40	18.080.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	500.000	40	500.000	40	500.000	40	500.000	40	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	3.600.000	40	3.600.000	40	3.600.000	40	3.600.000	40	3.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	42.000.000	40	42.000.000	40	42.000.000	40	42.000.000	40	42.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	7.200.000	40	7.200.000	40	7.200.000	40	7.200.000	40	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	14.000.000	40	14.000.000	40	14.000.000	40	14.000.000	40	14.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	3.000.000	40	3.000.000	40	3.000.000	40	3.000.000	40	3.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	3.000.000	40	3.000.000	40	3.000.000	40	3.000.000	40	3.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	1.000.000	40	1.000.000	40	1.000.000	40	1.000.000	40	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	6	6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO

		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	40	40	8.000.000	40	8.000.000	40	8.000.000	40	8.000.000	40	8.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****							1.424.050.000		1.424.050.000		1.424.050.000		1.424.050.000		1.424.050.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Meningkatkan penanganan PPKS dalam Panti sesuai SPM bidang sosial	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera ****	Orang	0	75	75	1.424.050.000	75	1.424.050.000	75	1.424.050.000	75	1.424.050.000	75	1.424.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan *****							750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	750.000	75	750.000	75	750.000	75	750.000	75	750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang *****							194.100.000		194.100.000		194.100.000		194.100.000		194.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	194.100.000	75	194.100.000	75	194.100.000	75	194.100.000	75	194.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							33.450.000		33.450.000		33.450.000		33.450.000		33.450.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	33.450.000	75	33.450.000	75	33.450.000	75	33.450.000	75	33.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	750.000	75	750.000	75	750.000	75	750.000	75	750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	0	0	10.800.000	0	10.800.000	0	10.800.000	0	10.800.000	0	10.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	7.200.000	75	7.200.000	75	7.200.000	75	7.200.000	75	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							356.625.000		356.625.000		356.625.000		356.625.000		356.625.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	356.625.000	75	356.625.000	75	356.625.000	75	356.625.000	75	356.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	22.500.000	75	22.500.000	75	22.500.000	75	22.500.000	75	22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							759.375.000		759.375.000		759.375.000		759.375.000		759.375.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	759.375.000	75	759.375.000	75	759.375.000	75	759.375.000	75	759.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	75	75	15.000.000	75	15.000.000	75	15.000.000	75	15.000.000	75	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	1.000.000	75	1.000.000	75	1.000.000	75	1.000.000	75	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti *****							11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****							986.760.000		986.760.000		986.760.000		986.760.000		986.760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Meningkatkan penanganan PPKS dalam Panti sesuai SPM bidang sosial	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera ****	Orang	0	60	60	986.760.000	60	986.760.000	60	986.760.000	60	986.760.000	60	986.760.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							625.500.000		625.500.000		625.500.000		625.500.000		625.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	

						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	60	60	625.500.000	60	625.500.000	60	625.500.000	60	625.500.000	60	625.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang *****							181.320.000		181.320.000		181.320.000		181.320.000		181.320.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	60	60	181.320.000	60	181.320.000	60	181.320.000	60	181.320.000	60	181.320.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							29.640.000		29.640.000		29.640.000		29.640.000		29.640.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	60	60	29.640.000	60	29.640.000	60	29.640.000	60	29.640.000	60	29.640.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	60	60	500.000	60	500.000	60	500.000	60	500.000	60	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial *****							5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	60	60	5.400.000	60	5.400.000	60	5.400.000	60	5.400.000	60	5.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							91.500.000		91.500.000		91.500.000		91.500.000		91.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	60	60	91.500.000	60	91.500.000	60	91.500.000	60	91.500.000	60	91.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	60	60	7.200.000	60	7.200.000	60	7.200.000	60	7.200.000	60	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	60	60	4.500.000	60	4.500.000	60	4.500.000	60	4.500.000	60	4.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan *****							13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	9	9	13.500.000	9	13.500.000	9	13.500.000	9	13.500.000	9	13.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	60	60	1.000.000	60	1.000.000	60	1.000.000	60	1.000.000	60	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar *****							10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	60	60	10.200.000	60	10.200.000	60	10.200.000	60	10.200.000	60	10.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	60	60	12.000.000	60	12.000.000	60	12.000.000	60	12.000.000	60	12.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera PURWOREJO
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									2.277.000.000		2.277.000.000		2.277.000.000		2.277.000.000		2.277.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	2.277.000.000	100	2.277.000.000	100	2.277.000.000	100	2.277.000.000	100	2.277.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								1.583.000.000		1.583.000.000		1.583.000.000		1.583.000.000		1.583.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo ****	Orang	0	100	100	1.583.000.000	100	1.583.000.000	100	1.583.000.000	100	1.583.000.000	100	1.583.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							1.042.500.000		1.042.500.000		1.042.500.000		1.042.500.000		1.042.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	1.042.500.000	100	1.042.500.000	100	1.042.500.000	100	1.042.500.000	100	1.042.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang *****							302.200.000		302.200.000		302.200.000		302.200.000		302.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	302.200.000	100	302.200.000	100	302.200.000	100	302.200.000	100	302.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							49.400.000		49.400.000		49.400.000		49.400.000		49.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	

						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	49.400.000	100	49.400.000	100	49.400.000	100	49.400.000	100	49.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial *****							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							101.500.000		101.500.000		101.500.000		101.500.000		101.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	101.500.000	100	101.500.000	100	101.500.000	100	101.500.000	100	101.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan *****							22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	15	15	22.500.000	15	22.500.000	15	22.500.000	15	22.500.000	15	22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar *****							12.200.000		12.200.000		12.200.000		12.200.000		12.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	12.200.000	100	12.200.000	100	12.200.000	100	12.200.000	100	12.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti ****								694.000.000		694.000.000		694.000.000		694.000.000		694.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo ****	Orang	0	50	50	694.000.000	50	694.000.000	50	694.000.000	50	694.000.000	50	694.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan *****							506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang *****							87.050.000		87.050.000		87.050.000		87.050.000		87.050.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	87.050.000	50	87.050.000	50	87.050.000	50	87.050.000	50	87.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses *****							16.300.000		16.300.000		16.300.000		16.300.000		16.300.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	16.300.000	50	16.300.000	50	16.300.000	50	16.300.000	50	16.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.04.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.04.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	

						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.04.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar *****							43.000.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	43.000.000	50	43.000.000	50	43.000.000	50	43.000.000	50	43.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo PURWOREJO
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal *****							7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *****	Dokumen	0	50	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		1.06.04.1.04.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									3.380.672.000		3.380.672.000		3.380.672.000		3.380.672.000		3.380.672.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	3.380.672.000	100	3.380.672.000	100	3.380.672.000	100	3.380.672.000	100	3.380.672.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								1.797.672.000		1.797.672.000		1.797.672.000		1.797.672.000		1.797.672.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar pada PPSLU Dewanata	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata ****	Orang	0	130	130	1.797.672.000	130	1.797.672.000	130	1.797.672.000	130	1.797.672.000	130	1.797.672.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							1.316.250.000		1.316.250.000		1.316.250.000		1.316.250.000		1.316.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	1.316.250.000	130	1.316.250.000	130	1.316.250.000	130	1.316.250.000	130	1.316.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****							230.802.000		230.802.000		230.802.000		230.802.000		230.802.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	230.802.000	130	230.802.000	130	230.802.000	130	230.802.000	130	230.802.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							64.220.000		64.220.000		64.220.000		64.220.000		64.220.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	64.220.000	130	64.220.000	130	64.220.000	130	64.220.000	130	64.220.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	500.000	130	500.000	130	500.000	130	500.000	130	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							11.700.000		11.700.000		11.700.000		11.700.000		11.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	11.700.000	130	11.700.000	130	11.700.000	130	11.700.000	130	11.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							55.500.000		55.500.000		55.500.000		55.500.000		55.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	55.500.000	130	55.500.000	130	55.500.000	130	55.500.000	130	55.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	7.200.000	130	7.200.000	130	7.200.000	130	7.200.000	130	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							45.500.000		45.500.000		45.500.000		45.500.000		45.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	45.500.000	130	45.500.000	130	45.500.000	130	45.500.000	130	45.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							9.750.000		9.750.000		9.750.000		9.750.000		9.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	9.750.000	130	9.750.000	130	9.750.000	130	9.750.000	130	9.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							9.750.000		9.750.000		9.750.000		9.750.000		9.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	

						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	9.750.000	130	9.750.000	130	9.750.000	130	9.750.000	130	9.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	1.000.000	130	1.000.000	130	1.000.000	130	1.000.000	130	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****							19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	20	20	19.500.000	20	19.500.000	20	19.500.000	20	19.500.000	20	19.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	130	130	26.000.000	130	26.000.000	130	26.000.000	130	26.000.000	130	26.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****							1.583.000.000		1.583.000.000		1.583.000.000		1.583.000.000		1.583.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar pada PPSLU Dewanata	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata ****	Orang	0	100	100	1.583.000.000	100	1.583.000.000	100	1.583.000.000	100	1.583.000.000	100	1.583.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							1.042.500.000		1.042.500.000		1.042.500.000		1.042.500.000		1.042.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	1.042.500.000	100	1.042.500.000	100	1.042.500.000	100	1.042.500.000	100	1.042.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang *****							302.200.000		302.200.000		302.200.000		302.200.000		302.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	302.200.000	100	302.200.000	100	302.200.000	100	302.200.000	100	302.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							49.400.000		49.400.000		49.400.000		49.400.000		49.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	49.400.000	100	49.400.000	100	49.400.000	100	49.400.000	100	49.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial *****							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							101.500.000		101.500.000		101.500.000		101.500.000		101.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	101.500.000	100	101.500.000	100	101.500.000	100	101.500.000	100	101.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan *****							22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	15	15	22.500.000	15	22.500.000	15	22.500.000	15	22.500.000	15	22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar *****							12.200.000		12.200.000		12.200.000		12.200.000		12.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	12.200.000	100	12.200.000	100	12.200.000	100	12.200.000	100	12.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	

						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	CILACAP Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									1.433.940.000		1.433.940.000		1.433.940.000		1.433.940.000		1.433.940.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	0	0	1.433.940.000	0	1.433.940.000	0	1.433.940.000	0	1.433.940.000	0	1.433.940.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								1.433.940.000		1.433.940.000		1.433.940.000		1.433.940.000		1.433.940.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar pada PPSLU Sudagaran	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial ****	Orang	0	90	90	1.433.940.000	90	1.433.940.000	90	1.433.940.000	90	1.433.940.000	90	1.433.940.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							938.250.000		938.250.000		938.250.000		938.250.000		938.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	938.250.000	90	938.250.000	90	938.250.000	90	938.250.000	90	938.250.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang *****							271.980.000		271.980.000		271.980.000		271.980.000		271.980.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	271.980.000	90	271.980.000	90	271.980.000	90	271.980.000	90	271.980.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							44.460.000		44.460.000		44.460.000		44.460.000		44.460.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	44.460.000	90	44.460.000	90	44.460.000	90	44.460.000	90	44.460.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	500.000	90	500.000	90	500.000	90	500.000	90	500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial *****							8.100.000		8.100.000		8.100.000		8.100.000		8.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	8.100.000	90	8.100.000	90	8.100.000	90	8.100.000	90	8.100.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							99.000.000		99.000.000		99.000.000		99.000.000		99.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	99.000.000	90	99.000.000	90	99.000.000	90	99.000.000	90	99.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	7.200.000	90	7.200.000	90	7.200.000	90	7.200.000	90	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							6.750.000		6.750.000		6.750.000		6.750.000		6.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	6.750.000	90	6.750.000	90	6.750.000	90	6.750.000	90	6.750.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							6.750.000		6.750.000		6.750.000		6.750.000		6.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	6.750.000	90	6.750.000	90	6.750.000	90	6.750.000	90	6.750.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan *****							20.250.000		20.250.000		20.250.000		20.250.000		20.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	20.250.000	90	20.250.000	90	20.250.000	90	20.250.000	90	20.250.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	1.000.000	90	1.000.000	90	1.000.000	90	1.000.000	90	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar *****							11.700.000		11.700.000		11.700.000		11.700.000		11.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	11.700.000	90	11.700.000	90	11.700.000	90	11.700.000	90	11.700.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	90	90	18.000.000	90	18.000.000	90	18.000.000	90	18.000.000	90	18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									4.662.366.000		4.662.366.000		4.662.366.000		4.662.366.000		4.662.366.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	4.662.366.000	100	4.662.366.000	100	4.662.366.000	100	4.662.366.000	100	4.662.366.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								1.932.516.000		1.932.516.000		1.932.516.000		1.932.516.000		1.932.516.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	

						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar pada PPS Raharjo	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo *****	Orang	0	100	100	1.932.516.000	100	1.932.516.000	100	1.932.516.000	100	1.932.516.000	100	1.932.516.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****						1.417.500.000		1.417.500.000		1.417.500.000		1.417.500.000		1.417.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	140	140	1.417.500.000	140	1.417.500.000	140	1.417.500.000	140	1.417.500.000	140	1.417.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****						248.556.000		248.556.000		248.556.000		248.556.000		248.556.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	140	140	248.556.000	140	248.556.000	140	248.556.000	140	248.556.000	140	248.556.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****						69.160.000		69.160.000		69.160.000		69.160.000		69.160.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	140	140	69.160.000	140	69.160.000	140	69.160.000	140	69.160.000	140	69.160.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	140	140	500.000	140	500.000	140	500.000	140	500.000	140	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****						12.600.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	140	140	12.600.000	140	12.600.000	140	12.600.000	140	12.600.000	140	12.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****						57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	140	140	57.000.000	140	57.000.000	140	57.000.000	140	57.000.000	140	57.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****						7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	0	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****						49.000.000		49.000.000		49.000.000		49.000.000		49.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	140	140	49.000.000	140	49.000.000	140	49.000.000	140	49.000.000	140	49.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****						10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	140	140	10.500.000	140	10.500.000	140	10.500.000	140	10.500.000	140	10.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****						10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	140	140	10.500.000	140	10.500.000	140	10.500.000	140	10.500.000	140	10.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas *****						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	140	140	1.000.000	140	1.000.000	140	1.000.000	140	1.000.000	140	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****						21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	21	21	21.000.000	21	21.000.000	21	21.000.000	21	21.000.000	21	21.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****						28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	140	140	28.000.000	140	28.000.000	140	28.000.000	140	28.000.000	140	28.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****							1.892.150.000		1.892.150.000		1.892.150.000		1.892.150.000		1.892.150.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial anak terlantar pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo ****	Orang	0	100	100	1.892.150.000	100	1.892.150.000	100	1.892.150.000	100	1.892.150.000	100	1.892.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan *****						750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	750.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang *****						258.800.000		258.800.000		258.800.000		258.800.000		258.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	258.800.000	100	258.800.000	100	258.800.000	100	258.800.000	100	258.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****						44.600.000		44.600.000		44.600.000		44.600.000		44.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	44.600.000	100	44.600.000	100	44.600.000	100	44.600.000	100	44.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN

		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	10.800.000	100	10.800.000	100	10.800.000	100	10.800.000	100	10.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	100	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							475.500.000		475.500.000		475.500.000		475.500.000		475.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	475.500.000	100	475.500.000	100	475.500.000	100	475.500.000	100	475.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							1.012.500.000		1.012.500.000		1.012.500.000		1.012.500.000		1.012.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	1.012.500.000	100	1.012.500.000	100	1.012.500.000	100	1.012.500.000	100	1.012.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								837.700.000		837.700.000		837.700.000		837.700.000		837.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo ****	Orang	0	100	100	837.700.000	100	837.700.000	100	837.700.000	100	837.700.000	100	837.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							521.250.000		521.250.000		521.250.000		521.250.000		521.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	521.250.000	50	521.250.000	50	521.250.000	50	521.250.000	50	521.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang *****							151.100.000		151.100.000		151.100.000		151.100.000		151.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	151.100.000	50	151.100.000	50	151.100.000	50	151.100.000	50	151.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							24.700.000		24.700.000		24.700.000		24.700.000		24.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	24.700.000	50	24.700.000	50	24.700.000	50	24.700.000	50	24.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial *****							4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							89.000.000		89.000.000		89.000.000		89.000.000		89.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	89.000.000	50	89.000.000	50	89.000.000	50	89.000.000	50	89.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN

		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	0	0	3.750.000	0	3.750.000	0	3.750.000	0	3.750.000	0	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan *****							11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	8	8	11.250.000	8	11.250.000	8	11.250.000	8	11.250.000	8	11.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar *****							9.700.000		9.700.000		9.700.000		9.700.000		9.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	9.700.000	50	9.700.000	50	9.700.000	50	9.700.000	50	9.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	50	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Raharjo SRAGEN
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									1.424.050.000		1.424.050.000		1.424.050.000		1.424.050.000		1.424.050.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	1.424.050.000	100	1.424.050.000	100	1.424.050.000	100	1.424.050.000	100	1.424.050.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****								1.424.050.000		1.424.050.000		1.424.050.000		1.424.050.000		1.424.050.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial Anak Terlantar Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu ****	%	0	0	0	1.424.050.000	0	1.424.050.000	0	1.424.050.000	0	1.424.050.000	0	1.424.050.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan *****							750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	750.000	75	750.000	75	750.000	75	750.000	75	750.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang *****							194.100.000		194.100.000		194.100.000		194.100.000		194.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	194.100.000	75	194.100.000	75	194.100.000	75	194.100.000	75	194.100.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							33.450.000		33.450.000		33.450.000		33.450.000		33.450.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	33.450.000	75	33.450.000	75	33.450.000	75	33.450.000	75	33.450.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	750.000	75	750.000	75	750.000	75	750.000	75	750.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	10.800.000	75	10.800.000	75	10.800.000	75	10.800.000	75	10.800.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	7.200.000	75	7.200.000	75	7.200.000	75	7.200.000	75	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							356.625.000		356.625.000		356.625.000		356.625.000		356.625.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	356.625.000	75	356.625.000	75	356.625.000	75	356.625.000	75	356.625.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	22.500.000	75	22.500.000	75	22.500.000	75	22.500.000	75	22.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu

		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							759.375.000		759.375.000		759.375.000		759.375.000		759.375.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	759.375.000	75	759.375.000	75	759.375.000	75	759.375.000	75	759.375.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	75	75	15.000.000	75	15.000.000	75	15.000.000	75	15.000.000	75	15.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	1.000.000	75	1.000.000	75	1.000.000	75	1.000.000	75	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	DEMAK Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti *****							11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									3.822.174.000		3.822.174.000		3.822.174.000		3.822.174.000		3.822.174.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	3.822.174.000	100	3.822.174.000	100	3.822.174.000	100	3.822.174.000	100	3.822.174.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								2.876.424.000		2.876.424.000		2.876.424.000		2.876.424.000		2.876.424.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar pada PPS Samekto Karti	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti ****	Orang	0	210	210	2.876.424.000	210	2.876.424.000	210	2.876.424.000	210	2.876.424.000	210	2.876.424.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							2.126.250.000		2.126.250.000		2.126.250.000		2.126.250.000		2.126.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	210	210	2.126.250.000	210	2.126.250.000	210	2.126.250.000	210	2.126.250.000	210	2.126.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****							372.834.000		372.834.000		372.834.000		372.834.000		372.834.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	210	210	372.834.000	210	372.834.000	210	372.834.000	210	372.834.000	210	372.834.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							103.740.000		103.740.000		103.740.000		103.740.000		103.740.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	210	210	103.740.000	210	103.740.000	210	103.740.000	210	103.740.000	210	103.740.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	210	210	500.000	210	500.000	210	500.000	210	500.000	210	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							18.900.000		18.900.000		18.900.000		18.900.000		18.900.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	210	210	18.900.000	210	18.900.000	210	18.900.000	210	18.900.000	210	18.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							67.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	210	210	67.500.000	210	67.500.000	210	67.500.000	210	67.500.000	210	67.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	210	210	7.200.000	210	7.200.000	210	7.200.000	210	7.200.000	210	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							73.500.000		73.500.000		73.500.000		73.500.000		73.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	210	210	73.500.000	210	73.500.000	210	73.500.000	210	73.500.000	210	73.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							15.750.000		15.750.000		15.750.000		15.750.000		15.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	210	210	15.750.000	210	15.750.000	210	15.750.000	210	15.750.000	210	15.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							15.750.000		15.750.000		15.750.000		15.750.000		15.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	210	210	15.750.000	210	15.750.000	210	15.750.000	210	15.750.000	210	15.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	

						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	210	210	1.000.000	210	1.000.000	210	1.000.000	210	1.000.000	210	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****							31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	32	32	31.500.000	32	31.500.000	32	31.500.000	32	31.500.000	32	31.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	4	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****							945.750.000		945.750.000		945.750.000		945.750.000		945.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial anak terlantar pada PPS Samekto Karti	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti ****	Orang	0	50	50	945.750.000	50	945.750.000	50	945.750.000	50	945.750.000	50	945.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan *****							750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	750.000	50	750.000	50	750.000	50	750.000	50	750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang *****							119.200.000		119.200.000		119.200.000		119.200.000		119.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	119.200.000	50	119.200.000	50	119.200.000	50	119.200.000	50	119.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							22.300.000		22.300.000		22.300.000		22.300.000		22.300.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	22.300.000	50	22.300.000	50	22.300.000	50	22.300.000	50	22.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	10.800.000	50	10.800.000	50	10.800.000	50	10.800.000	50	10.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							237.750.000		237.750.000		237.750.000		237.750.000		237.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	237.750.000	50	237.750.000	50	237.750.000	50	237.750.000	50	237.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti *****							7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti PEMALANG
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									2.293.940.000		2.293.940.000		2.293.940.000		2.293.940.000		2.293.940.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	

						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	2.293.940.000	100	2.293.940.000	100	2.293.940.000	100	2.293.940.000	100	2.293.940.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								1.732.060.000		1.732.060.000		1.732.060.000		1.732.060.000		1.732.060.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial Lanjut usia Terlantar pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendpatkan rehabilitasi sosial pada PPSLU Bisma Upakara ****	Orang	0	110	110	1.732.060.000	110	1.732.060.000	110	1.732.060.000	110	1.732.060.000	110	1.732.060.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							1.146.750.000		1.146.750.000		1.146.750.000		1.146.750.000		1.146.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	100	1.146.750.000	100	1.146.750.000	100	1.146.750.000	100	1.146.750.000	100	1.146.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang *****							332.420.000		332.420.000		332.420.000		332.420.000		332.420.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	332.420.000	110	332.420.000	110	332.420.000	110	332.420.000	110	332.420.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							54.340.000		54.340.000		54.340.000		54.340.000		54.340.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	54.340.000	110	54.340.000	110	54.340.000	110	54.340.000	110	54.340.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial *****							9.900.000		9.900.000		9.900.000		9.900.000		9.900.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	9.900.000	110	9.900.000	110	9.900.000	110	9.900.000	110	9.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							104.000.000		104.000.000		104.000.000		104.000.000		104.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	104.000.000	110	104.000.000	110	104.000.000	110	104.000.000	110	104.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	7.200.000	110	7.200.000	110	7.200.000	110	7.200.000	100	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							8.250.000		8.250.000		8.250.000		8.250.000		8.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	8.250.000	110	8.250.000	110	8.250.000	110	8.250.000	110	8.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							8.250.000		8.250.000		8.250.000		8.250.000		8.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	8.250.000	110	8.250.000	110	8.250.000	110	8.250.000	110	8.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan *****							24.750.000		24.750.000		24.750.000		24.750.000		24.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	22	22	24.750.000	22	24.750.000	22	24.750.000	22	24.750.000	22	24.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	22	22	1.000.000	22	1.000.000	22	1.000.000	22	1.000.000	22	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar *****							12.700.000		12.700.000		12.700.000		12.700.000		12.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	110	110	12.700.000	110	12.700.000	110	12.700.000	110	12.700.000	110	12.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	4	4	22.000.000	4	22.000.000	4	22.000.000	4	22.000.000	4	22.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti ****								561.880.000		561.880.000		561.880.000		561.880.000		561.880.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada PPSLU Bisma Upakara ****	Orang	0	40	40	561.880.000	40	561.880.000	40	561.880.000	40	561.880.000	40	561.880.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan *****							405.000.000		405.000.000		405.000.000		405.000.000		405.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	405.000.000	40	405.000.000	40	405.000.000	40	405.000.000	40	405.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang *****							69.640.000		69.640.000		69.640.000		69.640.000		69.640.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	

						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	69.640.000	40	69.640.000	40	69.640.000	40	69.640.000	40	69.640.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses *****							13.040.000		13.040.000		13.040.000		13.040.000		13.040.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	13.040.000	40	13.040.000	40	13.040.000	40	13.040.000	40	13.040.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.04.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	4.800.000	40	4.800.000	40	4.800.000	40	4.800.000	40	4.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	7.200.000	40	7.200.000	40	7.200.000	40	7.200.000	40	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.04.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	7.200.000	40	7.200.000	40	7.200.000	40	7.200.000	40	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.04.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar *****							38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	38.000.000	40	38.000.000	40	38.000.000	40	38.000.000	40	38.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	2.000.000	40	2.000.000	40	2.000.000	40	2.000.000	40	2.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	40	40	6.000.000	40	6.000.000	40	6.000.000	40	6.000.000	40	6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti *****							8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *****	Dokumen	0	40	40	8.000.000	40	8.000.000	40	8.000.000	40	8.000.000	40	8.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04.1.04.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	10	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									3.715.890.000		3.715.890.000		3.715.890.000		3.715.890.000		3.715.890.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	3.715.890.000	100	3.715.890.000	100	3.715.890.000	100	3.715.890.000	100	3.715.890.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								716.820.000		716.820.000		716.820.000		716.820.000		716.820.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar pada PPS Bojong Bata	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata ****	Orang	0	50	50	716.820.000	50	716.820.000	50	716.820.000	50	716.820.000	50	716.820.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****							88.770.000		88.770.000		88.770.000		88.770.000		88.770.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	88.770.000	50	88.770.000	50	88.770.000	50	88.770.000	50	88.770.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							22.600.000		22.600.000		22.600.000		22.600.000		22.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	22.600.000	50	22.600.000	50	22.600.000	50	22.600.000	50	22.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	50	4.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata

		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							43.500.000		43.500.000		43.500.000		43.500.000		43.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	43.500.000	50	43.500.000	50	43.500.000	50	43.500.000	50	43.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	17.500.000	50	17.500.000	50	17.500.000	50	17.500.000	50	17.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000		3.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	50	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****							7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	8	8	7.500.000	8	7.500.000	8	7.500.000	8	7.500.000	8	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								2.999.070.000		2.999.070.000		2.999.070.000		2.999.070.000		2.999.070.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar pada PPS Bojong Bata	Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata ****	Orang	0	195	195	2.999.070.000	195	2.999.070.000	195	2.999.070.000	195	2.999.070.000	195	2.999.070.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							2.032.875.000		2.032.875.000		2.032.875.000		2.032.875.000		2.032.875.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	195	195	2.032.875.000	195	2.032.875.000	195	2.032.875.000	195	2.032.875.000	195	2.032.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang *****							589.290.000		589.290.000		589.290.000		589.290.000		589.290.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	195	195	589.290.000	195	589.290.000	195	589.290.000	195	589.290.000	195	589.290.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							96.330.000		96.330.000		96.330.000		96.330.000		96.330.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	195	195	96.330.000	195	96.330.000	195	96.330.000	195	96.330.000	195	96.330.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	195	195	500.000	195	500.000	195	500.000	195	500.000	195	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial *****							17.550.000		17.550.000		17.550.000		17.550.000		17.550.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	195	195	17.550.000	195	17.550.000	195	17.550.000	195	17.550.000	195	17.550.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							125.250.000		125.250.000		125.250.000		125.250.000		125.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	195	195	125.250.000	195	125.250.000	195	125.250.000	195	125.250.000	195	125.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	195	195	7.200.000	195	7.200.000	195	7.200.000	195	7.200.000	195	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							14.625.000		14.625.000		14.625.000		14.625.000		14.625.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	195	195	14.625.000	195	14.625.000	195	14.625.000	195	14.625.000	195	14.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG

		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							14.625.000		14.625.000		14.625.000		14.625.000		14.625.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	195	195	14.625.000	195	14.625.000	195	14.625.000	195	14.625.000	195	14.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan *****							43.875.000		43.875.000		43.875.000		43.875.000		43.875.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	30	30	43.875.000	30	43.875.000	30	43.875.000	30	43.875.000	30	43.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar*****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	195	195	1.000.000	195	1.000.000	195	1.000.000	195	1.000.000	195	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar *****							16.950.000		16.950.000		16.950.000		16.950.000		16.950.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	195	195	16.950.000	195	16.950.000	195	16.950.000	195	16.950.000	195	16.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	4	4	39.000.000	4	39.000.000	4	39.000.000	4	39.000.000	4	39.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata PEMALANG
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									3.083.210.000		3.083.210.000		3.083.210.000		3.083.210.000		3.083.210.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	3.083.210.000	100	3.083.210.000	100	3.083.210.000	100	3.083.210.000	100	3.083.210.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								1.052.880.000		1.052.880.000		1.052.880.000		1.052.880.000		1.052.880.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi ****	Orang	0	75	75	1.052.880.000	75	1.052.880.000	75	1.052.880.000	75	1.052.880.000	75	1.052.880.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							759.375.000		759.375.000		759.375.000		759.375.000		759.375.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	759.375.000	75	759.375.000	75	759.375.000	75	759.375.000	75	759.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****							133.155.000		133.155.000		133.155.000		133.155.000		133.155.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	133.155.000	75	133.155.000	75	133.155.000	75	133.155.000	75	133.155.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							33.900.000		33.900.000		33.900.000		33.900.000		33.900.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	33.900.000	75	33.900.000	75	33.900.000	75	33.900.000	75	33.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	500.000	75	500.000	75	500.000	75	500.000	75	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							6.750.000		6.750.000		6.750.000		6.750.000		6.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	6.750.000	75	6.750.000	75	6.750.000	75	6.750.000	75	6.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							47.250.000		47.250.000		47.250.000		47.250.000		47.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	47.250.000	75	47.250.000	75	47.250.000	75	47.250.000	75	47.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	7.200.000	75	7.200.000	75	7.200.000	75	7.200.000	75	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							26.250.000		26.250.000		26.250.000		26.250.000		26.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	26.250.000	75	26.250.000	75	26.250.000	75	26.250.000	75	26.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							5.625.000		5.625.000		5.625.000		5.625.000		5.625.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	5.625.000	75	5.625.000	75	5.625.000	75	5.625.000	75	5.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							5.625.000		5.625.000		5.625.000		5.625.000		5.625.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	5.625.000	75	5.625.000	75	5.625.000	75	5.625.000	75	5.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	

						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	1.000.000	75	1.000.000	75	1.000.000	75	1.000.000	75	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****							11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	75	11.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	75	75	15.000.000	75	15.000.000	75	15.000.000	75	15.000.000	75	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****								1.330.430.000		1.330.430.000		1.330.430.000		1.330.430.000		1.330.430.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial PPKS Anak Disabilitas Terlantar pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi ****	Orang	0	70	70	1.330.430.000	70	1.330.430.000	70	1.330.430.000	70	1.330.430.000	70	1.330.430.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan *****							750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	70	70	750.000	70	750.000	70	750.000	70	750.000	70	750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang *****							181.160.000		181.160.000		181.160.000		181.160.000		181.160.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	70	70	181.160.000	70	181.160.000	70	181.160.000	70	181.160.000	70	181.160.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							31.220.000		31.220.000		31.220.000		31.220.000		31.220.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	70	70	31.220.000	70	31.220.000	70	31.220.000	70	31.220.000	70	31.220.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							700.000		700.000		700.000		700.000		700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	70	70	700.000	70	700.000	70	700.000	70	700.000	70	700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	70	70	10.800.000	70	10.800.000	70	10.800.000	70	10.800.000	70	10.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	70	70	7.200.000	70	7.200.000	70	7.200.000	70	7.200.000	70	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							332.850.000		332.850.000		332.850.000		332.850.000		332.850.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	70	70	332.850.000	70	332.850.000	70	332.850.000	70	332.850.000	70	332.850.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	70	70	10.500.000	70	10.500.000	70	10.500.000	70	10.500.000	70	10.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	70	70	21.000.000	70	21.000.000	70	21.000.000	70	21.000.000	70	21.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							708.750.000		708.750.000		708.750.000		708.750.000		708.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	70	70	708.750.000	70	708.750.000	70	708.750.000	70	708.750.000	70	708.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	70	70	14.000.000	70	14.000.000	70	14.000.000	70	14.000.000	70	14.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	70	70	1.000.000	70	1.000.000	70	1.000.000	70	1.000.000	70	1.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti *****							10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	70	70	10.500.000	70	10.500.000	70	10.500.000	70	10.500.000	70	10.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi

		1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti ****								699.900.000		699.900.000		699.900.000		699.900.000		699.900.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial PPKS PMKS Lainya diluar HIV/AIDS dan Napza Terlantar pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Jumlah PPKSLainya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi ****	Orang	0	50	50	699.900.000	50	699.900.000	50	699.900.000	50	699.900.000	50	699.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan *****							506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000		506.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	50	506.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang *****							81.950.000		81.950.000		81.950.000		81.950.000		81.950.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	81.950.000	50	81.950.000	50	81.950.000	50	81.950.000	50	81.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses *****							22.300.000		22.300.000		22.300.000		22.300.000		22.300.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	22.300.000	50	22.300.000	50	22.300.000	50	22.300.000	50	22.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.05.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							48.500.000		48.500.000		48.500.000		48.500.000		48.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	48.500.000	50	48.500.000	50	48.500.000	50	48.500.000	50	48.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.05.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.05.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	50	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal *****							7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal *****	Orang	0	50	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA *****	Dokumen	0	50	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04.1.05.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									3.465.714.000		3.465.714.000		3.465.714.000		3.465.714.000		3.465.714.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	3.465.714.000	100	3.465.714.000	100	3.465.714.000	100	3.465.714.000	100	3.465.714.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								1.190.874.000		1.190.874.000		1.190.874.000		1.190.874.000		1.190.874.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Terlantar pada Panti Pelayanan Sosial PMKS Margo Widodo	Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo ****	Orang	0	100	100	1.190.874.000	100	1.190.874.000	100	1.190.874.000	100	1.190.874.000	100	1.190.874.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							860.625.000		860.625.000		860.625.000		860.625.000		860.625.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	

						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	860.625.000	85	860.625.000	85	860.625.000	85	860.625.000	85	860.625.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang *****						150.909.000		150.909.000		150.909.000		150.909.000		150.909.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	150.909.000	85	150.909.000	85	150.909.000	85	150.909.000	85	150.909.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****						41.990.000		41.990.000		41.990.000		41.990.000		41.990.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	41.990.000	85	41.990.000	85	41.990.000	85	41.990.000	85	41.990.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	500.000	85	500.000	85	500.000	85	500.000	85	500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****						7.650.000		7.650.000		7.650.000		7.650.000		7.650.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	7.650.000	85	7.650.000	85	7.650.000	85	7.650.000	85	7.650.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****						48.750.000		48.750.000		48.750.000		48.750.000		48.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	48.750.000	85	48.750.000	85	48.750.000	85	48.750.000	85	48.750.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****						7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	7.200.000	85	7.200.000	85	7.200.000	85	7.200.000	85	7.200.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****						29.750.000		29.750.000		29.750.000		29.750.000		29.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	29.750.000	85	29.750.000	85	29.750.000	85	29.750.000	85	29.750.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****						6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****						6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	85	6.375.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas *****						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	85	85	1.000.000	85	1.000.000	85	1.000.000	85	1.000.000	85	1.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan *****						12.750.000		12.750.000		12.750.000		12.750.000		12.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	12	12	12.750.000	12	12.750.000	12	12.750.000	12	12.750.000	12	12.750.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****						17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	85	85	17.000.000	85	17.000.000	85	17.000.000	85	17.000.000	85	17.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti ****						2.274.840.000		2.274.840.000		2.274.840.000		2.274.840.000		2.274.840.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Meningkatkan Kualitas Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA pada Panti Pelayanan Sosial PMKS Margo Widodo	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo ****	Orang	0	100	100	2.274.840.000	100	2.274.840.000	100	2.274.840.000	100	2.274.840.000	100	2.274.840.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan *****						1.721.250.000		1.721.250.000		1.721.250.000		1.721.250.000		1.721.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	170	170	1.721.250.000	170	1.721.250.000	170	1.721.250.000	170	1.721.250.000	170	1.721.250.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang *****						295.970.000		295.970.000		295.970.000		295.970.000		295.970.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	170	170	295.970.000	170	295.970.000	170	295.970.000	170	295.970.000	170	295.970.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses *****						75.820.000		75.820.000		75.820.000		75.820.000		75.820.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	

						Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	170	170	75.820.000	170	75.820.000	170	75.820.000	170	75.820.000	170	75.820.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.05.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							20.400.000		20.400.000		20.400.000		20.400.000		20.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	170	170	20.400.000	170	20.400.000	170	20.400.000	170	20.400.000	170	20.400.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial *****							78.500.000		78.500.000		78.500.000		78.500.000		78.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	170	170	78.500.000	170	78.500.000	170	78.500.000	170	78.500.000	170	78.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.05.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	170	170	7.200.000	170	7.200.000	170	7.200.000	170	7.200.000	170	7.200.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.05.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	170	170	7.200.000	170	7.200.000	170	7.200.000	170	7.200.000	170	7.200.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	170	170	8.500.000	170	8.500.000	170	8.500.000	170	8.500.000	170	8.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal *****							25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal *****	Orang	0	170	170	25.500.000	170	25.500.000	170	25.500.000	170	25.500.000	170	25.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA *****							34.000.000		34.000.000		34.000.000		34.000.000		34.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA *****	Dokumen	0	170	170	34.000.000	170	34.000.000	170	34.000.000	170	34.000.000	170	34.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04.1.05.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS *****							500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	170	170	500.000	170	500.000	170	500.000	170	500.000	170	500.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	KOTA SEMARANG Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									1.517.670.000		1.517.670.000		1.517.670.000		1.517.670.000		1.517.670.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	1.517.670.000	100	1.517.670.000	100	1.517.670.000	100	1.517.670.000	100	1.517.670.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****								1.517.670.000		1.517.670.000		1.517.670.000		1.517.670.000		1.517.670.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Meningkatkan Kualitas Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial ****	Orang	0	80	80	1.517.670.000	80	1.517.670.000	80	1.517.670.000	80	1.517.670.000	80	1.517.670.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan *****							750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	750.000	80	750.000	80	750.000	80	750.000	80	750.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang *****							207.040.000		207.040.000		207.040.000		207.040.000		207.040.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	207.040.000	80	207.040.000	80	207.040.000	80	207.040.000	80	207.040.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							35.680.000		35.680.000		35.680.000		35.680.000		35.680.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	35.680.000	80	35.680.000	80	35.680.000	80	35.680.000	80	35.680.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							800.000		800.000		800.000		800.000		800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	800.000	80	800.000	80	800.000	80	800.000	80	800.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	10.800.000	80	10.800.000	80	10.800.000	80	10.800.000	80	10.800.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	

						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	7.200.000	80	7.200.000	80	7.200.000	80	7.200.000	80	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							380.400.000		380.400.000		380.400.000		380.400.000		380.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	380.400.000	80	380.400.000	80	380.400.000	80	380.400.000	80	380.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	24.000.000	80	24.000.000	80	24.000.000	80	24.000.000	80	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							810.000.000		810.000.000		810.000.000		810.000.000		810.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	810.000.000	80	810.000.000	80	810.000.000	80	810.000.000	80	810.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	80	80	16.000.000	80	16.000.000	80	16.000.000	80	16.000.000	80	16.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	1.000.000	80	1.000.000	80	1.000.000	80	1.000.000	80	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti *****							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									1.501.350.000		1.501.350.000		1.501.350.000		1.501.350.000		1.501.350.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	0	0	1.501.350.000	0	1.501.350.000	0	1.501.350.000	0	1.501.350.000	0	1.501.350.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****							1.501.350.000		1.501.350.000		1.501.350.000		1.501.350.000		1.501.350.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial anak terlantar pada PPS Pamardi Utomo	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial ****	Orang	0	80	80	1.501.350.000	80	1.501.350.000	80	1.501.350.000	80	1.501.350.000	80	1.501.350.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan *****							750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	750.000	80	750.000	80	750.000	80	750.000	80	750.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang *****							190.720.000		190.720.000		190.720.000		190.720.000		190.720.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	190.720.000	80	190.720.000	80	190.720.000	80	190.720.000	80	190.720.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							35.680.000		35.680.000		35.680.000		35.680.000		35.680.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	35.680.000	80	35.680.000	80	35.680.000	80	35.680.000	80	35.680.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							800.000		800.000		800.000		800.000		800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	800.000	80	800.000	80	800.000	80	800.000	80	800.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	10.800.000	80	10.800.000	80	10.800.000	80	10.800.000	80	10.800.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	7.200.000	80	7.200.000	80	7.200.000	80	7.200.000	80	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							380.400.000		380.400.000		380.400.000		380.400.000		380.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	380.400.000	80	380.400.000	80	380.400.000	80	380.400.000	80	380.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	

						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	24.000.000	80	24.000.000	80	24.000.000	80	24.000.000	80	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							810.000.000		810.000.000		810.000.000		810.000.000		810.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	810.000.000	80	810.000.000	80	810.000.000	80	810.000.000	80	810.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	80	80	16.000.000	80	16.000.000	80	16.000.000	80	16.000.000	80	16.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	1.000.000	80	1.000.000	80	1.000.000	80	1.000.000	80	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti *****							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	80	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	80	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									1.704.910.000		1.704.910.000		1.704.910.000		1.704.910.000		1.704.910.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	1.704.910.000	100	1.704.910.000	100	1.704.910.000	100	1.704.910.000	100	1.704.910.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****							1.704.910.000		1.704.910.000		1.704.910.000		1.704.910.000		1.704.910.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Meningkatkan Kualitas Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial ****	Orang	0	90	90	1.704.910.000	90	1.704.910.000	90	1.704.910.000	90	1.704.910.000	90	1.704.910.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan *****							750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	750.000	90	750.000	90	750.000	90	750.000	90	750.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang *****							232.920.000		232.920.000		232.920.000		232.920.000		232.920.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	232.920.000	90	232.920.000	90	232.920.000	90	232.920.000	90	232.920.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							40.140.000		40.140.000		40.140.000		40.140.000		40.140.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	40.140.000	90	40.140.000	90	40.140.000	90	40.140.000	90	40.140.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							900.000		900.000		900.000		900.000		900.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	900.000	90	900.000	90	900.000	90	900.000	90	900.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	10.800.000	90	10.800.000	90	10.800.000	90	10.800.000	90	10.800.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	7.200.000	90	7.200.000	90	7.200.000	90	7.200.000	90	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							427.950.000		427.950.000		427.950.000		427.950.000		427.950.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	427.950.000	90	427.950.000	90	427.950.000	90	427.950.000	90	427.950.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	13.500.000	90	13.500.000	90	13.500.000	90	13.500.000	90	13.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	27.000.000	90	27.000.000	90	27.000.000	90	27.000.000	90	27.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							911.250.000		911.250.000		911.250.000		911.250.000		911.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	911.250.000	90	911.250.000	90	911.250.000	90	911.250.000	90	911.250.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	

						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	90	90	18.000.000	90	18.000.000	90	18.000.000	90	18.000.000	90	18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	1.000.000	90	1.000.000	90	1.000.000	90	1.000.000	90	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti *****							13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	90	90	13.500.000	90	13.500.000	90	13.500.000	90	13.500.000	90	13.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									2.440.610.000		2.440.610.000		2.440.610.000		2.440.610.000		2.440.610.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	2.440.610.000	100	2.440.610.000	100	2.440.610.000	100	2.440.610.000	100	2.440.610.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****								2.440.610.000		2.440.610.000		2.440.610.000		2.440.610.000		2.440.610.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Meningkatkan Kualitas Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar pada Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial ****	Orang	0	130	130	2.440.610.000	130	2.440.610.000	130	2.440.610.000	130	2.440.610.000	130	2.440.610.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan *****							750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	750.000	130	750.000	130	750.000	130	750.000	130	750.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	KOTA SALATIGA Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang *****							323.180.000		323.180.000		323.180.000		323.180.000		323.180.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	323.180.000	130	323.180.000	130	323.180.000	130	323.180.000	130	323.180.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	KOTA SALATIGA Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							57.980.000		57.980.000		57.980.000		57.980.000		57.980.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	57.980.000	130	57.980.000	130	57.980.000	130	57.980.000	130	57.980.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	KOTA SALATIGA Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	1.300.000	130	1.300.000	130	1.300.000	130	1.300.000	130	1.300.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	KOTA SALATIGA Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	10.800.000	130	10.800.000	130	10.800.000	130	10.800.000	130	10.800.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	KOTA SALATIGA Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	7.200.000	130	7.200.000	130	7.200.000	130	7.200.000	130	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	KOTA SALATIGA Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							618.150.000		618.150.000		618.150.000		618.150.000		618.150.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	618.150.000	130	618.150.000	130	618.150.000	130	618.150.000	130	618.150.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	KOTA SALATIGA Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	19.500.000	130	19.500.000	130	19.500.000	130	19.500.000	130	19.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	KOTA SALATIGA Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	39.000.000	130	39.000.000	130	39.000.000	130	39.000.000	130	39.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	KOTA SALATIGA Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							1.316.250.000		1.316.250.000		1.316.250.000		1.316.250.000		1.316.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	1.316.250.000	130	1.316.250.000	130	1.316.250.000	130	1.316.250.000	130	1.316.250.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	KOTA SALATIGA Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	130	130	26.000.000	130	26.000.000	130	26.000.000	130	26.000.000	130	26.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	KOTA SALATIGA Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	1.000.000	130	1.000.000	130	1.000.000	130	1.000.000	130	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	KOTA SALATIGA Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti *****							19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	

						Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	130	130	19.500.000	130	19.500.000	130	19.500.000	130	19.500.000	130	19.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	KOTA SALATIGA Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ***									2.254.390.000		2.254.390.000		2.254.390.000		2.254.390.000		2.254.390.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial ***	%	0	100	100	2.254.390.000	100	2.254.390.000	100	2.254.390.000	100	2.254.390.000	100	2.254.390.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****								2.254.390.000		2.254.390.000		2.254.390.000		2.254.390.000		2.254.390.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Meningkatkan Kualitas Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial ****	Orang	0	120	120	2.254.390.000	120	2.254.390.000	120	2.254.390.000	120	2.254.390.000	120	2.254.390.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan *****							750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	750.000	120	750.000	120	750.000	120	750.000	120	750.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang *****							298.320.000		298.320.000		298.320.000		298.320.000		298.320.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	298.320.000	120	298.320.000	120	298.320.000	120	298.320.000	120	298.320.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses *****							53.520.000		53.520.000		53.520.000		53.520.000		53.520.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	53.520.000	120	53.520.000	120	53.520.000	120	53.520.000	120	53.520.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti *****							1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	1.200.000	120	1.200.000	120	1.200.000	120	1.200.000	120	1.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial *****							10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	10.800.000	120	10.800.000	120	10.800.000	120	10.800.000	120	10.800.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	7.200.000	120	7.200.000	120	7.200.000	120	7.200.000	120	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar *****							570.600.000		570.600.000		570.600.000		570.600.000		570.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	570.600.000	120	570.600.000	120	570.600.000	120	570.600.000	120	570.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *****							18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	18.000.000	120	18.000.000	120	18.000.000	120	18.000.000	120	18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *****							36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	24	24	36.000.000	24	36.000.000	24	36.000.000	24	36.000.000	24	36.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							1.215.000.000		1.215.000.000		1.215.000.000		1.215.000.000		1.215.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	120	120	1.215.000.000	120	1.215.000.000	120	1.215.000.000	120	1.215.000.000	120	1.215.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti *****							18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	24	24	18.000.000	24	18.000.000	24	18.000.000	24	18.000.000	24	18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL ***									300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti ***	%	0	100	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
		1.06.05.1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal ****								300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						terfailitasinya penerbitan rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan ****	Dokumen	0	200	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	

		1.06.05.1.01.0001			Pengangkatan Anak antar WNI *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti ***	%	0	100	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	100	14.969.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								3.382.750.000		3.382.750.000		3.382.750.000		3.382.750.000		3.382.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan reahabilitasi di dalam Panti ****	Orang	0	2100	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							2.982.750.000		2.982.750.000		2.982.750.000		2.982.750.000		2.982.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	2100	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	20	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****								2.471.750.000		2.471.750.000		2.471.750.000		2.471.750.000		2.471.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti ****	Orang	0	1700	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							2.371.750.000		2.371.750.000		2.371.750.000		2.371.750.000		2.371.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	1700	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								711.000.000		711.000.000		711.000.000		711.000.000		711.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti ****	Orang	0	400	400	711.000.000	400	711.000.000	400	711.000.000	400	711.000.000	400	711.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							611.000.000		611.000.000		611.000.000		611.000.000		611.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	400	400	611.000.000	400	611.000.000	400	611.000.000	400	611.000.000	400	611.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti ****								919.375.000		919.375.000		919.375.000		919.375.000		919.375.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti ****	Orang	0	250	250	919.375.000	250	919.375.000	250	919.375.000	250	919.375.000	250	919.375.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan *****							419.375.000		419.375.000		419.375.000		419.375.000		419.375.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	250	250	419.375.000	250	419.375.000	250	419.375.000	250	419.375.000	250	419.375.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti *****							500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti ***	%	0	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	

		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ****								3.382.750.000		3.382.750.000		3.382.750.000		3.382.750.000		3.382.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan reahabilitasi di dalam Panti ****	Orang	0	2100	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	2100	3.382.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							2.982.750.000		2.982.750.000		2.982.750.000		2.982.750.000		2.982.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	2100	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	2100	2.982.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	20	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar *****	Dokumen	0	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti ****								2.471.750.000		2.471.750.000		2.471.750.000		2.471.750.000		2.471.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti ****	Orang	0	1700	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	1700	2.471.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan *****							2.371.750.000		2.371.750.000		2.371.750.000		2.371.750.000		2.371.750.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	1700	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	1700	2.371.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti ****								711.000.000		711.000.000		711.000.000		711.000.000		711.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti ****	Orang	0	400	400	711.000.000	400	711.000.000	400	711.000.000	400	711.000.000	400	711.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan *****							611.000.000		611.000.000		611.000.000		611.000.000		611.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	400	400	611.000.000	400	611.000.000	400	611.000.000	400	611.000.000	400	611.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	0	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti ****								919.375.000		919.375.000		919.375.000		919.375.000		919.375.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti ****	Orang	0	250	250	919.375.000	250	919.375.000	250	919.375.000	250	919.375.000	250	919.375.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan *****							419.375.000		419.375.000		419.375.000		419.375.000		419.375.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	250	250	419.375.000	250	419.375.000	250	419.375.000	250	419.375.000	250	419.375.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti *****							500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti *****	Dokumen	0	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
						Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti ***	%	0	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
		1.06.05.1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal ****								300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	
						terfailitasinya penerbitan rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan ****	Dokumen	0	200	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.05.1.01.0001			Pengangkatan Anak antar WNI *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial	

						Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	200	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL ***									61.000.000.000		61.000.000.000		61.000.000.000		61.000.000.000		61.000.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terselenggarannya jaminan sosial bagi PPKS yang layak dan tepat sasaran	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial ***	%	0	100	100	61.000.000.000	100	61.000.000.000	100	61.000.000.000	100	61.000.000.000	100	61.000.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		1.06.05.1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi ****								61.000.000.000		61.000.000.000		61.000.000.000		61.000.000.000		61.000.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terselenggaranya jaminan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial ****	Orang	0	0	0	61.000.000.000	0	61.000.000.000	0	61.000.000.000	0	61.000.000.000	0	61.000.000.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	
		1.06.05.1.02.0006			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga *****							61.000.000.000		61.000.000.000		61.000.000.000		61.000.000.000		61.000.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	12764	12764	61.000.000.000	12764	61.000.000.000	12764	61.000.000.000	12764	61.000.000.000	12764	61.000.000.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA ***									4.662.500.000		4.662.500.000		4.662.500.000		4.662.500.000		4.662.500.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terselenggaranya perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai standar SPM bidang sosial	Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SPM Bidang Sosial ***	%	0	100	100	4.662.500.000	100	4.662.500.000	100	4.662.500.000	100	4.662.500.000	100	4.662.500.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		1.06.06.1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi ****								4.662.500.000		4.662.500.000		4.662.500.000		4.662.500.000		4.662.500.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terselenggaranya perlindungan sosial bagi korban bencana alam sesuai SPM Bidang Sosial	Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial ****	Orang	0	0	0	3.270.000.000	0	3.270.000.000	0	3.270.000.000	0	3.270.000.000	0	3.270.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							3.640.000.000		3.640.000.000		3.640.000.000		3.640.000.000		3.640.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	3000	3000	1.820.000.000	3000	1.820.000.000	3000	1.820.000.000	3000	1.820.000.000	3000	1.820.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan *****							500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	300	300	250.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial *****							400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	1000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.06.06.1.01.0001 1			Penyediaan Sandang *****							900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	3000	3000	450.000.000	3000	450.000.000	3000	450.000.000	3000	450.000.000	3000	450.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.06.06.1.01.0001 3			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi *****							400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	3000	3000	200.000.000	3000	200.000.000	3000	200.000.000	3000	200.000.000	3000	200.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.06.06.1.01.0001 6			Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana *****							350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi *****	Orang	0	300	300	350.000.000	300	350.000.000	300	350.000.000	300	350.000.000	300	350.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						Terselenggaranya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial sesuai SPM Bidang Sosial	Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial ****	Orang	0	0	0	1.392.500.000	0	1.392.500.000	0	1.392.500.000	0	1.392.500.000	0	1.392.500.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan *****							435.000.000		435.000.000		435.000.000		435.000.000		435.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	250	250	217.500.000	250	217.500.000	250	217.500.000	250	217.500.000	250	217.500.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan *****							1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	500	500	650.000.000	500	650.000.000	500	650.000.000	500	650.000.000	500	650.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	75	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.06.06.1.01.0001 1			Penyediaan Sandang *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	

						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	250	250	75.000.000	250	75.000.000	250	75.000.000	250	75.000.000	250	75.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.06.06.1.01.00013			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	250	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.06.06.1.01.00022			Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas *****	Orang	0	150	150	200.000.000	150	200.000.000	150	200.000.000	150	200.000.000	150	200.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Menurunkan Populasi PPKS Fakir Miskin **											46.518.278.000		46.518.278.000		46.518.278.000		46.518.278.000		46.518.278.000	Dinas Sosial	
							Persentase Populasi PPKS Fakir Miskin **	%	9,96	9,6	9,48	46.518.278.000	9,17	46.518.278.000	8,91	46.518.278.000	8,59	46.518.278.000	8,27	46.518.278.000	Dinas Sosial	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL ***									11.198.278.000		11.198.278.000		11.198.278.000		11.198.278.000		11.198.278.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Meningkatnya kapasitas Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial ***	%	0	8,88	8,88	11.198.278.000	8,88	11.198.278.000	8,88	11.198.278.000	8,88	11.198.278.000	8,88	11.198.278.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
		1.06.02.1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****								300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Terfasilitasinya penerbitan rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab./kota	Jumlah penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab./kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan ****	Dokumen	0	0	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang *****	Dokumen	0	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
		1.06.02.1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi ****								10.898.278.000		10.898.278.000		10.898.278.000		10.898.278.000		10.898.278.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Meningkatnya kapasitas PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial *****	Orang	0	2073	2073	8.872.948.000	2073	8.872.948.000	2073	8.872.948.000	2073	8.872.948.000	2073	8.872.948.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi *****							480.000.000		480.000.000		480.000.000		480.000.000		480.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi *****	Lembaga	0	400	400	480.000.000	400	480.000.000	400	480.000.000	400	480.000.000	400	480.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
		1.06.02.1.02.0006			Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Tersedianya Usulan Akreditasi Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan *****	Lembaga	0	140	140	150.000.000	140	150.000.000	140	150.000.000	140	150.000.000	140	150.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
		1.06.02.1.02.0008			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi *****							7.757.948.000		7.757.948.000		7.757.948.000		7.757.948.000		7.757.948.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya ******	Orang	0	1318	1318	7.757.948.000	1318	7.757.948.000	1318	7.757.948.000	1318	7.757.948.000	1318	7.757.948.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
		1.06.02.1.02.0012			Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota *****							335.000.000		335.000.000		335.000.000		335.000.000		335.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Meningkatnya Kualitas Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar *****	Layanan	0	35	35	335.000.000	35	335.000.000	35	335.000.000	35	335.000.000	35	335.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
		1.06.02.1.02.0016			Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Meningkatnya Peran Puskesos sebagai Layanan Sosial Satu Pintu dan Hub Program Graduasi	Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi *****	Lembaga	0	15	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
						Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ****	Orang	0	0	0	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	1.600.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.0003			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi *****							1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi *****	Keluarga	0	4600	4600	1.300.000.000	4600	1.300.000.000	4600	1.300.000.000	4600	1.300.000.000	4600	1.300.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial

		1.06.02.1.02.0015			Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan *****	Badan Usaha	0	60	60	300.000.000	60	300.000.000	60	300.000.000	60	300.000.000	60	300.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
						Meningkatnya penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	jumlah orang yang mendapatkan penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial *****	Orang	0	0	0	425.330.000	0	425.330.000	0	425.330.000	0	425.330.000	0	425.330.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.0011			Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial *****							350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial *****	Orang	0	670	670	350.000.000	670	350.000.000	670	350.000.000	670	350.000.000	670	350.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
		1.06.02.1.02.0017			Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional *****							75.330.000		75.330.000		75.330.000		75.330.000		75.330.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Terlaksananya Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional *****	Orang	0	5	5	75.330.000	5	75.330.000	5	75.330.000	5	75.330.000	5	75.330.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL ***									35.000.000.000		35.000.000.000		35.000.000.000		35.000.000.000		35.000.000.000	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin	
						Meningkatnya kemampuan PPKS Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhannya	Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat ***	%	0	0,27	0,27	35.000.000.000	0,27	35.000.000.000	0,27	35.000.000.000	0,27	35.000.000.000	0,27	35.000.000.000	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin	
		1.06.05.1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi ****								35.000.000.000		35.000.000.000		35.000.000.000		35.000.000.000		35.000.000.000	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin	
						Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin lintas kabupaten/kota	Jumlah Kab./Kota yang melaksanakan pemutakhiran data ****	Kabupaten /Kota	0	0	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	
		1.06.05.1.02.0008			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi *****							2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin	
						Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin *****	Kabupaten /Kota	0	35	35	2.000.000.000	35	2.000.000.000	35	2.000.000.000	35	2.000.000.000	35	2.000.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin
						Terlaksananya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan provinsi (wilayah 1)	Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi (wil 1) ****	Orang	0	0	0	16.500.000.000	0	16.500.000.000	0	16.500.000.000	0	16.500.000.000	0	16.500.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	
		1.06.05.1.02.0003			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat *****							33.000.000.000		33.000.000.000		33.000.000.000		33.000.000.000		33.000.000.000	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	5000	5000	16.500.000.000	5000	16.500.000.000	5000	16.500.000.000	5000	16.500.000.000	5000	16.500.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin
						Terlaksananya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan provinsi (wilayah 2)	Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi (wil 2) ****	Orang	0	0	0	16.500.000.000	0	16.500.000.000	0	16.500.000.000	0	16.500.000.000	0	16.500.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	
		1.06.05.1.02.0003			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat *****							33.000.000.000		33.000.000.000		33.000.000.000		33.000.000.000		33.000.000.000	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin	
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi *****	Orang	0	5000	5000	16.500.000.000	5000	16.500.000.000	5000	16.500.000.000	5000	16.500.000.000	5000	16.500.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN ***									320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Taman makam pahlawan terkelola dengan baik	Persentase Taman makam pahlawan terkelola ***	%	0	100	100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
		1.06.07.1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi ****								320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Terlaksananya pengelolaan TMPN Provinsi	Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi ****	Unit	0	1	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.07.1.01.0001			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi *****	Dokumen	2	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
		1.06.07.1.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi *****							120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	
						Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi *****	Makam	1	1	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *												156.175.718.000		156.175.718.000		156.175.718.000		155.875.718.000		155.525.718.000	Dinas Sosial	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah *	Angka	80,95	81	81,25		81,5		81,75		82		82,5		Dinas Sosial	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah **											154.975.718.000		154.975.718.000		154.975.718.000		154.675.718.000		154.325.718.000	Dinas Sosial	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah **	Angka	88,5	88,75	89	154.975.718.000	89,25	154.975.718.000	89,5	154.975.718.000	89,75	154.675.718.000	90	154.325.718.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									142.249.658.000		142.249.658.000		142.249.658.000		141.949.658.000		141.599.658.000	Dinas Sosial	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	100	142.249.658.000	100	142.249.658.000	100	142.249.658.000	100	141.949.658.000	100	141.599.658.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								106.996.658.000		106.996.658.000		106.996.658.000		106.996.658.000		106.996.658.000	Dinas Sosial	

						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	0	5	5	106.996.658.000	5	106.996.658.000	5	106.996.658.000	5	106.996.658.000	5	106.996.658.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							104.696.658.000		104.696.658.000		104.696.658.000		104.696.658.000		104.696.658.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	550	550	550	104.696.658.000	550	104.696.658.000	550	104.696.658.000	550	104.696.658.000	550	104.696.658.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	0	4	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	0	4	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	0	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Sosial	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	0	2	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	0	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	0	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Sosial	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	0	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	Dinas Sosial	
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	0	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	0	10	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								2.836.000.000		2.836.000.000		2.836.000.000		2.836.000.000		2.836.000.000	Dinas Sosial	
						Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum , Kepegawaian dan Keuangan perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	0	100	100	2.836.000.000	100	2.836.000.000	100	2.836.000.000	100	2.836.000.000	100	2.836.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	2	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	4	4	36.000.000	4	36.000.000	4	36.000.000	4	36.000.000	4	36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Sosial	

						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	4	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	0	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.200.000.000		1.850.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	0	100	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.200.000.000	100	1.850.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		0	Dinas Sosial	
						Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	0	0	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		0		0	Dinas Sosial	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	0	5	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	10	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	20	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	3	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Sosial	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								17.867.000.000		17.867.000.000		17.867.000.000		17.867.000.000		17.867.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	0	16	16	17.867.000.000	16	17.867.000.000	16	17.867.000.000	16	17.867.000.000	16	17.867.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	0	4	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							16.367.000.000		16.367.000.000		16.367.000.000		16.367.000.000		16.367.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	0	4	4	16.367.000.000	4	16.367.000.000	4	16.367.000.000	4	16.367.000.000	4	16.367.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								11.300.000.000		11.300.000.000		11.300.000.000		11.300.000.000		11.300.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	0	58	58	11.300.000.000	58	11.300.000.000	58	11.300.000.000	58	11.300.000.000	58	11.300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	0	6	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	20	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial

		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****								350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****								10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	12	12	10.000.000.000	12	10.000.000.000	12	10.000.000.000	12	10.000.000.000	12	10.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****								250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	24	24	250.000.000	24	250.000.000	24	250.000.000	24	250.000.000	24	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Sosial
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***										473.530.000		473.530.000		473.530.000		473.530.000		473.530.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	473.530.000	100	473.530.000	100	473.530.000	100	473.530.000	100	473.530.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****									133.130.000		133.130.000		133.130.000		133.130.000		133.130.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	0	100	100	133.130.000	100	133.130.000	100	133.130.000	100	133.130.000	100	133.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*****								9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****								760.000		760.000		760.000		760.000		760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****								5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****								23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****								3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****								9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****								17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****								11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****								52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****									9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****								9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****									135.800.000		135.800.000		135.800.000		135.800.000		135.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	0	4	4	135.800.000	4	135.800.000	4	135.800.000	4	135.800.000	4	135.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****								3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****								132.000.000		132.000.000		132.000.000		132.000.000		132.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	132.000.000	12	132.000.000	12	132.000.000	12	132.000.000	12	132.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****									195.100.000		195.100.000		195.100.000		195.100.000		195.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	

						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	0		4	4	195.100.000	4	195.100.000	4	195.100.000	4	195.100.000	4	195.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							33.600.000		33.600.000		33.600.000		33.600.000		33.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0		2	2	33.600.000	2	33.600.000	2	33.600.000	2	33.600.000	2	33.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									458.630.000		458.630.000		458.630.000		458.630.000		458.630.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	458.630.000	100	458.630.000	100	458.630.000	100	458.630.000	100	458.630.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								126.630.000		126.630.000		126.630.000		126.630.000		126.630.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah ****	%	0	100	100	126.630.000	100	126.630.000	100	126.630.000	100	126.630.000	100	126.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							760.000		760.000		760.000		760.000		760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							45.500.000		45.500.000		45.500.000		45.500.000		45.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	4	4	45.500.000	4	45.500.000	4	45.500.000	4	45.500.000	4	45.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri ****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								140.600.000		140.600.000		140.600.000		140.600.000		140.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri ****	Laporan	0	4	4	140.600.000	4	140.600.000	4	140.600.000	4	140.600.000	4	140.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri	

						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							136.800.000		136.800.000		136.800.000		136.800.000		136.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri		
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	136.800.000	12	136.800.000	12	136.800.000	12	136.800.000	12	136.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah****								181.900.000		181.900.000		181.900.000		181.900.000		181.900.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri		
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri ****	Unit	0	4	4	181.900.000	4	181.900.000	4	181.900.000	4	181.900.000	4	181.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								20.400.000		20.400.000		20.400.000		20.400.000		20.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri		
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	20.400.000	2	20.400.000	2	20.400.000	2	20.400.000	2	20.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri		
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									665.860.000		665.860.000		665.860.000		665.860.000		665.860.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	665.860.000	100	665.860.000	100	665.860.000	100	665.860.000	100	665.860.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								191.060.000		191.060.000		191.060.000		191.060.000		191.060.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah ****	%	0	100	100	191.060.000	100	191.060.000	100	191.060.000	100	191.060.000	100	191.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasiltasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							71.500.000		71.500.000		71.500.000		71.500.000		71.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	4	4	71.500.000	4	71.500.000	4	71.500.000	4	71.500.000	4	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	0	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya		

						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								183.200.000		183.200.000		183.200.000		183.200.000		183.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya ****	Laporan	0	4	4	183.200.000	4	183.200.000	4	183.200.000	4	183.200.000	4	183.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							177.600.000		177.600.000		177.600.000		177.600.000		177.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	177.600.000	12	177.600.000	12	177.600.000	12	177.600.000	12	177.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								277.600.000		277.600.000		277.600.000		277.600.000		277.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya ****	Unit	0	6	6	277.600.000	6	277.600.000	6	277.600.000	6	277.600.000	6	277.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							43.600.000		43.600.000		43.600.000		43.600.000		43.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	43.600.000	2	43.600.000	2	43.600.000	2	43.600.000	2	43.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SEMARANG
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									418.130.000		418.130.000		418.130.000		418.130.000		418.130.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	418.130.000	100	418.130.000	100	418.130.000	100	418.130.000	100	418.130.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								146.130.000		146.130.000		146.130.000		146.130.000		146.130.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *****	%	0	100	100	146.130.000	100	146.130.000	100	146.130.000	100	146.130.000	100	146.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							760.000		760.000		760.000		760.000		760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	

						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								83.000.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	0	4	4	83.000.000	4	83.000.000	4	83.000.000	4	83.000.000	4	83.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	1	1	3.800.000	1	3.800.000	1	3.800.000	1	3.800.000	1	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							79.200.000		79.200.000		79.200.000		79.200.000		79.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	79.200.000	12	79.200.000	12	79.200.000	12	79.200.000	12	79.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								179.500.000		179.500.000		179.500.000		179.500.000		179.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	0	4	4	179.500.000	4	179.500.000	4	179.500.000	4	179.500.000	4	179.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									423.630.000		423.630.000		423.630.000		423.630.000		423.630.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	423.630.000	100	423.630.000	100	423.630.000	100	423.630.000	100	423.630.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								139.630.000		139.630.000		139.630.000		139.630.000		139.630.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring ****	%	0	100	100	139.630.000	100	139.630.000	100	139.630.000	100	139.630.000	100	139.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							760.000		760.000		760.000		760.000		760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi

		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							58.500.000		58.500.000		58.500.000		58.500.000		58.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	4	4	58.500.000	4	58.500.000	4	58.500.000	4	58.500.000	4	58.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								90.200.000		90.200.000		90.200.000		90.200.000		90.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	0	4	4	90.200.000	4	90.200.000	4	90.200.000	4	90.200.000	4	90.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							86.400.000		86.400.000		86.400.000		86.400.000		86.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	86.400.000	12	86.400.000	12	86.400.000	12	86.400.000	12	86.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah****								184.300.000		184.300.000		184.300.000		184.300.000		184.300.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring ****	Unit	0	4	4	184.300.000	4	184.300.000	4	184.300.000	4	184.300.000	4	184.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								22.800.000		22.800.000		22.800.000		22.800.000		22.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	22.800.000	2	22.800.000	2	22.800.000	2	22.800.000	2	22.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KENDAL OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									490.230.000		490.230.000		490.230.000		490.230.000		490.230.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	490.230.000	100	490.230.000	100	490.230.000	100	490.230.000	100	490.230.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								178.630.000		178.630.000		178.630.000		178.630.000		178.630.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede ****	%	0	100	100	178.630.000	100	178.630.000	100	178.630.000	100	178.630.000	100	178.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							760.000		760.000		760.000		760.000		760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	

						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							97.500.000		97.500.000		97.500.000		97.500.000		97.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	97.500.000	4	97.500.000	4	97.500.000	4	97.500.000	4	97.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede ****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								123.800.000		123.800.000		123.800.000		123.800.000		123.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede ****	Laporan	0	16	16	123.800.000	16	123.800.000	16	123.800.000	16	123.800.000	16	123.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								178.300.000		178.300.000		178.300.000		178.300.000		178.300.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede ****	Unit	0	32	32	178.300.000	32	178.300.000	32	178.300.000	32	178.300.000	32	178.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	16.800.000	2	16.800.000	2	16.800.000	2	16.800.000	2	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									501.530.000		501.530.000		501.530.000		501.530.000		501.530.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	0	0	501.530.000	0	501.530.000	0	501.530.000	0	501.530.000	0	501.530.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								185.130.000		185.130.000		185.130.000		185.130.000		185.130.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo ****	%	0	0	0	185.130.000	0	185.130.000	0	185.130.000	0	185.130.000	0	185.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	

						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							760.000		760.000		760.000		760.000		760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							104.000.000		104.000.000		104.000.000		104.000.000		104.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	4	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo ****	Unit	0	0	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								123.800.000		123.800.000		123.800.000		123.800.000		123.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo ****	Laporan	0	0	0	123.800.000	0	123.800.000	0	123.800.000	0	123.800.000	0	123.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								183.100.000		183.100.000		183.100.000		183.100.000		183.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo ****	Unit	0	0	0	183.100.000	0	183.100.000	0	183.100.000	0	183.100.000	0	183.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							21.600.000		21.600.000		21.600.000		21.600.000		21.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	21.600.000	2	21.600.000	2	21.600.000	2	21.600.000	2	21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo

		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									417.430.000		417.430.000		417.430.000		417.430.000		417.430.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	417.430.000	100	417.430.000	100	417.430.000	100	417.430.000	100	417.430.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								152.630.000		152.630.000		152.630.000		152.630.000		152.630.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo ****	%	0	0	0	152.630.000	0	152.630.000	0	152.630.000	0	152.630.000	0	152.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							760.000		760.000		760.000		760.000		760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							71.500.000		71.500.000		71.500.000		71.500.000		71.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	4	4	71.500.000	4	71.500.000	4	71.500.000	4	71.500.000	4	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai asettah daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo ****	Unit	0	0	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								69.800.000		69.800.000		69.800.000		69.800.000		69.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo ****	Unit	0	0	0	69.800.000	0	69.800.000	0	69.800.000	0	69.800.000	0	69.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	66.000.000	12	66.000.000	12	66.000.000	12	66.000.000	12	66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								185.500.000		185.500.000		185.500.000		185.500.000		185.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo ****	Unit	0	0	0	185.500.000	0	185.500.000	0	185.500.000	0	185.500.000	0	185.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	

						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KUDUS OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									418.630.000		418.630.000		418.630.000		418.630.000		418.630.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	418.630.000	100	418.630.000	100	418.630.000	100	418.630.000	100	418.630.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								152.630.000		152.630.000		152.630.000		152.630.000		152.630.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan ****	%	0	0	0	152.630.000	0	152.630.000	0	152.630.000	0	152.630.000	0	152.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							760.000		760.000		760.000		760.000		760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							71.500.000		71.500.000		71.500.000		71.500.000		71.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	71.500.000	4	71.500.000	4	71.500.000	4	71.500.000	4	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan ****	Unit	0	0	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								83.000.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan ****	Laporan	0	0	0	83.000.000	0	83.000.000	0	83.000.000	0	83.000.000	0	83.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							79.200.000		79.200.000		79.200.000		79.200.000		79.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	79.200.000	12	79.200.000	12	79.200.000	12	79.200.000	12	79.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								173.500.000		173.500.000		173.500.000		173.500.000		173.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	

						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan ****	Unit	0	0	0	173.500.000	0	173.500.000	0	173.500.000	0	173.500.000	0	173.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JEPARA OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									393.050.000		393.050.000		393.050.000		393.050.000		393.050.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	393.050.000	100	393.050.000	100	393.050.000	100	393.050.000	100	393.050.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								129.050.000		129.050.000		129.050.000		129.050.000		129.050.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama ****	%	0	100	100	129.050.000	100	129.050.000	100	129.050.000	100	129.050.000	100	129.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							600.000		600.000		600.000		600.000		600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	600.000	4	600.000	4	600.000	4	600.000	4	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							18.750.000		18.750.000		18.750.000		18.750.000		18.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	18.750.000	4	18.750.000	4	18.750.000	4	18.750.000	4	18.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	13.500.000	4	13.500.000	4	13.500.000	4	13.500.000	4	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama ****	Unit	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								109.800.000		109.800.000		109.800.000		109.800.000		109.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	

						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama ****	Laporan	0	0	0	109.800.000	0	109.800.000	0	109.800.000	0	109.800.000	0	109.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						106.800.000		106.800.000		106.800.000		106.800.000		106.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	106.800.000	12	106.800.000	12	106.800.000	12	106.800.000	12	106.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							146.700.000		146.700.000		146.700.000		146.700.000		146.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama ****	Unit	0	0	0	146.700.000	0	146.700.000	0	146.700.000	0	146.700.000	0	146.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	19.200.000	2	19.200.000	2	19.200.000	2	19.200.000	2	19.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						112.500.000		112.500.000		112.500.000		112.500.000		112.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	112.500.000	10	112.500.000	10	112.500.000	10	112.500.000	10	112.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								655.160.000		655.160.000		655.160.000		655.160.000		655.160.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	655.160.000	100	655.160.000	100	655.160.000	100	655.160.000	100	655.160.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							223.560.000		223.560.000		223.560.000		223.560.000		223.560.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *****	%	0	100	100	223.560.000	100	223.560.000	100	223.560.000	100	223.560.000	100	223.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****						25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasiltasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						104.000.000		104.000.000		104.000.000		104.000.000		104.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	

						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	0	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	0	4	4	140.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							134.400.000		134.400.000		134.400.000		134.400.000		134.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	134.400.000	12	134.400.000	12	134.400.000	12	134.400.000	12	134.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								277.600.000		277.600.000		277.600.000		277.600.000		277.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	0	4	4	277.600.000	4	277.600.000	4	277.600.000	4	277.600.000	4	277.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								39.600.000		39.600.000		39.600.000		39.600.000		39.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	39.600.000	2	39.600.000	2	39.600.000	2	39.600.000	2	39.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SUKOHARJO
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									649.160.000		649.160.000		649.160.000		649.160.000		649.160.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	649.160.000	100	649.160.000	100	649.160.000	100	649.160.000	100	649.160.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								223.560.000		223.560.000		223.560.000		223.560.000		223.560.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera ****	%	0	0	0	223.560.000	0	223.560.000	0	223.560.000	0	223.560.000	0	223.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	

						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							104.000.000		104.000.000		104.000.000		104.000.000		104.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera ****	Unit	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								154.400.000		154.400.000		154.400.000		154.400.000		154.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera ****	Unit	0	0	0	154.400.000	0	154.400.000	0	154.400.000	0	154.400.000	0	154.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							148.800.000		148.800.000		148.800.000		148.800.000		148.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	148.800.000	12	148.800.000	12	148.800.000	12	148.800.000	12	148.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								257.200.000		257.200.000		257.200.000		257.200.000		257.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera ****	Unit	0	0	0	257.200.000	0	257.200.000	0	257.200.000	0	257.200.000	0	257.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	19.200.000	2	19.200.000	2	19.200.000	2	19.200.000	2	19.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi REMBANG
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									603.560.000		603.560.000		603.560.000		603.560.000		603.560.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	603.560.000	100	603.560.000	100	603.560.000	100	603.560.000	100	603.560.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								223.560.000		223.560.000		223.560.000		223.560.000		223.560.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo ****	%	0	100	100	223.560.000	100	223.560.000	100	223.560.000	100	223.560.000	100	223.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	

						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							104.000.000		104.000.000		104.000.000		104.000.000		104.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	4	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah****								14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo ****	Unit	0	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								113.600.000		113.600.000		113.600.000		113.600.000		113.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo ****	Laporan	0	4	4	113.600.000	4	113.600.000	4	113.600.000	4	113.600.000	4	113.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							108.000.000		108.000.000		108.000.000		108.000.000		108.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	108.000.000	12	108.000.000	12	108.000.000	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								252.400.000		252.400.000		252.400.000		252.400.000		252.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo ****	Unit	0	4	4	252.400.000	4	252.400.000	4	252.400.000	4	252.400.000	4	252.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							14.400.000		14.400.000		14.400.000		14.400.000		14.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	14.400.000	2	14.400.000	2	14.400.000	2	14.400.000	2	14.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PURWOREJO
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									682.660.000		682.660.000		682.660.000		682.660.000		682.660.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	682.660.000	100	682.660.000	100	682.660.000	100	682.660.000	100	682.660.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								269.060.000		269.060.000		269.060.000		269.060.000		269.060.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata ****	%	0	100	100	269.060.000	100	269.060.000	100	269.060.000	100	269.060.000	100	269.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi

		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							149.500.000		149.500.000		149.500.000		149.500.000		149.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	149.500.000	4	149.500.000	4	149.500.000	4	149.500.000	4	149.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata ****	Unit	0	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								126.800.000		126.800.000		126.800.000		126.800.000		126.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata ****	Laporan	0	1	1	126.800.000	1	126.800.000	1	126.800.000	1	126.800.000	1	126.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							121.200.000		121.200.000		121.200.000		121.200.000		121.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	121.200.000	12	121.200.000	12	121.200.000	12	121.200.000	12	121.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								272.800.000		272.800.000		272.800.000		272.800.000		272.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata ****	Unit	0	4	4	272.800.000	4	272.800.000	4	272.800.000	4	272.800.000	4	272.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							34.800.000		34.800.000		34.800.000		34.800.000		34.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	34.800.000	2	34.800.000	2	34.800.000	2	34.800.000	2	34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	CILACAP OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									297.500.000		297.500.000		297.500.000		297.500.000		297.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	

						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	297.500.000	100	297.500.000	100	297.500.000	100	297.500.000	100	297.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								146.700.000		146.700.000		146.700.000		146.700.000		146.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran ****	%	0	100	100	146.700.000	100	146.700.000	100	146.700.000	100	146.700.000	100	146.700.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasiltasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANJARNEGARA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							104.000.000		104.000.000		104.000.000		104.000.000		104.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	4	104.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran ****	Unit	0	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								41.600.000		41.600.000		41.600.000		41.600.000		41.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran ****	Laporan	0	4	4	41.600.000	4	41.600.000	4	41.600.000	4	41.600.000	4	41.600.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							39.600.000		39.600.000		39.600.000		39.600.000		39.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	39.600.000	12	39.600.000	12	39.600.000	12	39.600.000	12	39.600.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								104.200.000		104.200.000		104.200.000		104.200.000		104.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran ****	Unit	0	2	2	104.200.000	2	104.200.000	2	104.200.000	2	104.200.000	2	104.200.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	19.200.000	2	19.200.000	2	19.200.000	2	19.200.000	2	19.200.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	

						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	BANYUMAS OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									763.890.000		763.890.000		763.890.000		763.890.000		763.890.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	763.890.000	100	763.890.000	100	763.890.000	100	763.890.000	100	763.890.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								255.490.000		255.490.000		255.490.000		255.490.000		255.490.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo ****	%	0	100	100	255.490.000	100	255.490.000	100	255.490.000	100	255.490.000	100	255.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	18.500.000	4	18.500.000	4	18.500.000	4	18.500.000	4	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							1.480.000		1.480.000		1.480.000		1.480.000		1.480.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	1.480.000	4	1.480.000	4	1.480.000	4	1.480.000	4	1.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							11.100.000		11.100.000		11.100.000		11.100.000		11.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	11.100.000	4	11.100.000	4	11.100.000	4	11.100.000	4	11.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							46.250.000		46.250.000		46.250.000		46.250.000		46.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	46.250.000	4	46.250.000	4	46.250.000	4	46.250.000	4	46.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	7.400.000	4	7.400.000	4	7.400.000	4	7.400.000	4	7.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							17.760.000		17.760.000		17.760.000		17.760.000		17.760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	17.760.000	12	17.760.000	12	17.760.000	12	17.760.000	12	17.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							33.300.000		33.300.000		33.300.000		33.300.000		33.300.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	33.300.000	4	33.300.000	4	33.300.000	4	33.300.000	4	33.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							22.200.000		22.200.000		22.200.000		22.200.000		22.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	22.200.000	4	22.200.000	4	22.200.000	4	22.200.000	4	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							97.500.000		97.500.000		97.500.000		97.500.000		97.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	4	4	97.500.000	4	97.500.000	4	97.500.000	4	97.500.000	4	97.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SRAGEN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo ****	Unit	0	1	1	18.500.000	1	18.500.000	1	18.500.000	1	18.500.000	1	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	18.500.000	1	18.500.000	1	18.500.000	1	18.500.000	1	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SRAGEN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								146.600.000		146.600.000		146.600.000		146.600.000		146.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo ****	Laporan	0	4	4	146.600.000	4	146.600.000	4	146.600.000	4	146.600.000	4	146.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	7.400.000	4	7.400.000	4	7.400.000	4	7.400.000	4	7.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SRAGEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							139.200.000		139.200.000		139.200.000		139.200.000		139.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	139.200.000	12	139.200.000	12	139.200.000	12	139.200.000	12	139.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SRAGEN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								343.300.000		343.300.000		343.300.000		343.300.000		343.300.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo ****	Unit	0	8	8	343.300.000	8	343.300.000	8	343.300.000	8	343.300.000	8	343.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	28.800.000	2	28.800.000	2	28.800.000	2	28.800.000	2	28.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	18.500.000	10	18.500.000	10	18.500.000	10	18.500.000	10	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							277.500.000		277.500.000		277.500.000		277.500.000		277.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	277.500.000	10	277.500.000	10	277.500.000	10	277.500.000	10	277.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	18.500.000	10	18.500.000	10	18.500.000	10	18.500.000	10	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									290.900.000		290.900.000		290.900.000		290.900.000		290.900.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	290.900.000	100	290.900.000	100	290.900.000	100	290.900.000	100	290.900.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							120.700.000		120.700.000		120.700.000		120.700.000		120.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan ****	%	0	100	100	120.700.000	100	120.700.000	100	120.700.000	100	120.700.000	100	120.700.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	4	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu ****	Unit	0	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							62.000.000		62.000.000		62.000.000		62.000.000		62.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu ****	Laporan	0	4	4	62.000.000	4	62.000.000	4	62.000.000	4	62.000.000	4	62.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi

		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								98.200.000		98.200.000		98.200.000		98.200.000		98.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu ****	Unit	0	2	2	98.200.000	2	98.200.000	2	98.200.000	2	98.200.000	2	98.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	13.200.000	2	13.200.000	2	13.200.000	2	13.200.000	2	13.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	KARANGANYAR OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									633.760.000		633.760.000		633.760.000		633.760.000		633.760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	633.760.000	100	633.760.000	100	633.760.000	100	633.760.000	100	633.760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								210.560.000		210.560.000		210.560.000		210.560.000		210.560.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti ****	%	0	100	100	210.560.000	100	210.560.000	100	210.560.000	100	210.560.000	100	210.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasiltasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							91.000.000		91.000.000		91.000.000		91.000.000		91.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	91.000.000	4	91.000.000	4	91.000.000	4	91.000.000	4	91.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti ****	Unit	0	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	

						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0		1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****									144.800.000		144.800.000		144.800.000		144.800.000		144.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti ****	Laporan	0		4	4	144.800.000	4	144.800.000	4	144.800.000	4	144.800.000	4	144.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****								5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0		4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****								139.200.000		139.200.000		139.200.000		139.200.000		139.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0		12	12	139.200.000	12	139.200.000	12	139.200.000	12	139.200.000	12	139.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****									264.400.000		264.400.000		264.400.000		264.400.000		264.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti ****	Unit	0		4	4	264.400.000	4	264.400.000	4	264.400.000	4	264.400.000	4	264.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								26.400.000		26.400.000		26.400.000		26.400.000		26.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0		2	2	26.400.000	2	26.400.000	2	26.400.000	2	26.400.000	2	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****								14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0		10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****								210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0		10	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****								14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0		10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***										453.230.000		453.230.000		453.230.000		453.230.000		453.230.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	100	453.230.000	100	453.230.000	100	453.230.000	100	453.230.000	100	453.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****									165.630.000		165.630.000		165.630.000		165.630.000		165.630.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *****	%	0		0	0	165.630.000	0	165.630.000	0	165.630.000	0	165.630.000	0	165.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****								9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0		4	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.06.0002				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****								760.000		760.000		760.000		760.000		760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0		4	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.06.0003				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****								5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0		4	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.06.0004				Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****								23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0		4	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.06.0005				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****								3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0		4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.06.0006				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****								9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0		12	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.06.0007				Penyediaan Bahan/Material *****								17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0		4	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.06.0008				Fasilitasi Kunjungan Tamu *****								11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0		4	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****								84.500.000		84.500.000		84.500.000		84.500.000		84.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	

						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	84.500.000	4	84.500.000	4	84.500.000	4	84.500.000	4	84.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	0	0	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								103.400.000		103.400.000		103.400.000		103.400.000		103.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	0	0	0	103.400.000	0	103.400.000	0	103.400.000	0	103.400.000	0	103.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							99.600.000		99.600.000		99.600.000		99.600.000		99.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	4	4	99.600.000	4	99.600.000	4	99.600.000	4	99.600.000	4	99.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								174.700.000		174.700.000		174.700.000		174.700.000		174.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	0	0	0	174.700.000	0	174.700.000	0	174.700.000	0	174.700.000	0	174.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	13.200.000	2	13.200.000	2	13.200.000	2	13.200.000	2	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									633.260.000		633.260.000		633.260.000		633.260.000		633.260.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	633.260.000	100	633.260.000	100	633.260.000	100	633.260.000	100	633.260.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								228.060.000		228.060.000		228.060.000		228.060.000		228.060.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata ****	%	0	100	100	228.060.000	100	228.060.000	100	228.060.000	100	228.060.000	100	228.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							52.500.000		52.500.000		52.500.000		52.500.000		52.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	52.500.000	4	52.500.000	4	52.500.000	4	52.500.000	4	52.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG

		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****								25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****								16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****								91.000.000		91.000.000		91.000.000		91.000.000		91.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	4	4	91.000.000	4	91.000.000	4	91.000.000	4	91.000.000	4	91.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****									14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata ****	Unit	0	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****								14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****									130.400.000		130.400.000		130.400.000		130.400.000		130.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata ****	Laporan	0	4	4	130.400.000	4	130.400.000	4	130.400.000	4	130.400.000	4	130.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****								5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****								124.800.000		124.800.000		124.800.000		124.800.000		124.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	124.800.000	12	124.800.000	12	124.800.000	12	124.800.000	12	124.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****									260.800.000		260.800.000		260.800.000		260.800.000		260.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata ****	Unit	0	4	4	260.800.000	4	260.800.000	4	260.800.000	4	260.800.000	4	260.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****									22.800.000		22.800.000		22.800.000		22.800.000		22.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	22.800.000	2	22.800.000	2	22.800.000	2	22.800.000	2	22.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****								14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****								210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****								14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEMALANG
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***										591.960.000		591.960.000		591.960.000		591.960.000		591.960.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	591.960.000	100	591.960.000	100	591.960.000	100	591.960.000	100	591.960.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****									197.560.000		197.560.000		197.560.000		197.560.000		197.560.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	0	0	0	197.560.000	0	197.560.000	0	197.560.000	0	197.560.000	0	197.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*****								14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****								1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	4	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****								8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	4	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****								35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	

						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000		13.440.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	12	13.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	4	25.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000		16.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	4	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								123.200.000		123.200.000		123.200.000		123.200.000		123.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	0	0	0	123.200.000	0	123.200.000	0	123.200.000	0	123.200.000	0	123.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000		5.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	4	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							117.600.000		117.600.000		117.600.000		117.600.000		117.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	4	4	117.600.000	4	117.600.000	4	117.600.000	4	117.600.000	4	117.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								257.200.000		257.200.000		257.200.000		257.200.000		257.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	0	0	0	257.200.000	0	257.200.000	0	257.200.000	0	257.200.000	0	257.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	19.200.000	2	19.200.000	2	19.200.000	2	19.200.000	2	19.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									417.070.000		417.070.000		417.070.000		417.070.000		417.070.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	417.070.000	100	417.070.000	100	417.070.000	100	417.070.000	100	417.070.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								133.130.000		133.130.000		133.130.000		133.130.000		133.130.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo ****	%	0	100	100	133.130.000	100	133.130.000	100	133.130.000	100	133.130.000	100	133.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							760.000		760.000		760.000		760.000		760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	4	760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	4	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	4	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000		9.120.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	12	9.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000		17.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo ****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								85.400.000		85.400.000		85.400.000		85.400.000		85.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo ****	Laporan	0	4	4	85.400.000	4	85.400.000	4	85.400.000	4	85.400.000	4	85.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	4	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							81.600.000		81.600.000		81.600.000		81.600.000		81.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	81.600.000	12	81.600.000	12	81.600.000	12	81.600.000	12	81.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								189.040.000		189.040.000		189.040.000		189.040.000		189.040.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo ****	Unit	0	4	4	189.040.000	4	189.040.000	4	189.040.000	4	189.040.000	4	189.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							21.600.000		21.600.000		21.600.000		21.600.000		21.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	21.600.000	2	21.600.000	2	21.600.000	2	21.600.000	2	21.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	10	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000		142.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	10	142.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							15.440.000		15.440.000		15.440.000		15.440.000		15.440.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	15.440.000	10	15.440.000	10	15.440.000	10	15.440.000	10	15.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									251.500.000		251.500.000		251.500.000		251.500.000		251.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	

						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	100	251.500.000	100	251.500.000	100	251.500.000	100	251.500.000	100	251.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								94.700.000		94.700.000		94.700.000		94.700.000		94.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra ****	%	0	100	100	94.700.000	100	94.700.000	100	94.700.000	100	94.700.000	100	94.700.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasiltasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	4	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra ****	Unit	0	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								59.600.000		59.600.000		59.600.000		59.600.000		59.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra ****	Laporan	0	4	4	59.600.000	4	59.600.000	4	59.600.000	4	59.600.000	4	59.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							57.600.000		57.600.000		57.600.000		57.600.000		57.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	57.600.000	12	57.600.000	12	57.600.000	12	57.600.000	12	57.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								92.200.000		92.200.000		92.200.000		92.200.000		92.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra ****	Unit	0	2	2	92.200.000	2	92.200.000	2	92.200.000	2	92.200.000	2	92.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	7.200.000	2	7.200.000	2	7.200.000	2	7.200.000	2	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	

						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	DEMAK OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									280.100.000		280.100.000		280.100.000		280.100.000		280.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	0	0	280.100.000	0	280.100.000	0	280.100.000	0	280.100.000	0	280.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								107.700.000		107.700.000		107.700.000		107.700.000		107.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah ****	%	0	0	0	107.700.000	0	107.700.000	0	107.700.000	0	107.700.000	0	107.700.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	4	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah****								5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo ****	Unit	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								77.600.000		77.600.000		77.600.000		77.600.000		77.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo ****	Laporan	0	0	0	77.600.000	0	77.600.000	0	77.600.000	0	77.600.000	0	77.600.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							75.600.000		75.600.000		75.600.000		75.600.000		75.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	75.600.000	12	75.600.000	12	75.600.000	12	75.600.000	12	75.600.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								89.800.000		89.800.000		89.800.000		89.800.000		89.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo ****	Unit	0	0	0	89.800.000	0	89.800.000	0	89.800.000	0	89.800.000	0	89.800.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	

		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	4.800.000	2	4.800.000	2	4.800.000	2	4.800.000	2	4.800.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BLORA OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	BOYOLALI OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									281.100.000		281.100.000		281.100.000		281.100.000		281.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	281.100.000	100	281.100.000	100	281.100.000	100	281.100.000	100	281.100.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								120.700.000		120.700.000		120.700.000		120.700.000		120.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	0	100	100	120.700.000	100	120.700.000	100	120.700.000	100	120.700.000	100	120.700.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	0	4	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	0	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								60.800.000		60.800.000		60.800.000		60.800.000		60.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	0	4	4	60.800.000	4	60.800.000	4	60.800.000	4	60.800.000	4	60.800.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							58.800.000		58.800.000		58.800.000		58.800.000		58.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	

						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	58.800.000	12	58.800.000	12	58.800.000	12	58.800.000	12	58.800.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								94.600.000		94.600.000		94.600.000		94.600.000		94.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	0	0	0	94.600.000	0	94.600.000	0	94.600.000	0	94.600.000	0	94.600.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	9.600.000	2	9.600.000	2	9.600.000	2	9.600.000	2	9.600.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									259.900.000		259.900.000		259.900.000		259.900.000		259.900.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	259.900.000	100	259.900.000	100	259.900.000	100	259.900.000	100	259.900.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								94.700.000		94.700.000		94.700.000		94.700.000		94.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	0	100	100	94.700.000	100	94.700.000	100	94.700.000	100	94.700.000	100	94.700.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ******							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	12	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	4	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	4	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	4	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	4	52.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	0	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ******							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								66.800.000		66.800.000		66.800.000		66.800.000		66.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	

						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	0	4	4	66.800.000	4	66.800.000	4	66.800.000	4	66.800.000	4	66.800.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							64.800.000		64.800.000		64.800.000		64.800.000		64.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	12	12	64.800.000	12	64.800.000	12	64.800.000	12	64.800.000	12	64.800.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								93.400.000		93.400.000		93.400.000		93.400.000		93.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	0	4	4	93.400.000	4	93.400.000	4	93.400.000	4	93.400.000	4	93.400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	2	2	8.400.000	2	8.400.000	2	8.400.000	2	8.400.000	2	8.400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									320.700.000		320.700.000		320.700.000		320.700.000		320.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	0	100	100	320.700.000	100	320.700.000	100	320.700.000	100	320.700.000	100	320.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								120.700.000		120.700.000		120.700.000		120.700.000		120.700.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	0	100	100	120.700.000	100	120.700.000	100	120.700.000	100	120.700.000	100	120.700.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	0	0	0	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material *****							9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan *****	Paket	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*****	Laporan	0	0	0	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	0	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	

		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								92.000.000		92.000.000		92.000.000		92.000.000		92.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	0	4	4	92.000.000	4	92.000.000	4	92.000.000	4	92.000.000	4	92.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								103.000.000		103.000.000		103.000.000		103.000.000		103.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	0	2	2	103.000.000	2	103.000.000	2	103.000.000	2	103.000.000	2	103.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ******							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah **											1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas Sosial	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah **	Angka	3,028	3,05	3,075	1.200.000.000	3,1	1.200.000.000	3,125	1.200.000.000	3,15	1.200.000.000	3,175	1.200.000.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas Sosial	
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ***	%	100	100	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas Sosial	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	0	100	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Dinas Sosial	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	0	5	5	600.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	0	2	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Sosial

Tabel 4.2
Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah
Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5		
1	Mendorong Pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas di setiap Kecamatan	Bimbingan Teknis Puskesos, Honor Petugas Assesment, Bantuan Transport Rujukan PM Disabilitas	75 Lembaga	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraa Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota	Bidang Resos	DP3AKB
2	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Terlantar dan Fakir Miskin	Penguatan Anggaran dan Perubahan manajemen Balai Rehabilitasi Sosial	100%	Program Rehabilitasi Sosial	UPT	
		Pelatihan kepada Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang termasuk dalam PM Panti	100%	Program Rehabilitasi Sosial	UPT	
3	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Tagana (Taruna Siaga Bencana)	1.500 orang	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Bidang Linjamsos	BPBD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menurut BPKP (2004), indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Secara ringkas indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Target indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian indikator kinerja yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	10,95	10,67	10,13	10,01	9,7	9,44	8,7	8,36	8,36
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Menurunnya Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Fakir Miskin	Persentase Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Fakir Miskin	%	10,19	9,96	9,6	9,48	9,17	8,91	8,59	8,27	8,27
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat kompotensinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	0	0	0	8,88	17,76	26,64	35,52	44,4	44,4
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintergritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	0	80,95	81	81,25	81,5	81,75	82	82,25	82,25
		Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	0	3,028	3,05	3,075	3,1	3,125	3,15	3,175	3,175
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	0	88,5	88,75	89	89,25	89,5	89,75	90	90

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas bagi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	0	0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	44,4
2	Taman Makam Pahlawan terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
4	Terfasilitasinya penerbitan rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
5	Terfasilitasinya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
6	Terselenggaranya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
7	Terselenggaranya perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai standar SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
8	Meningkatnya kemampuan PPKS Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhannya	%	0	0	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	1,35
10	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
13	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
14	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
15	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100

16	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
17	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
18	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
19	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
20	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
21	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
22	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
23	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
24	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
25	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
26	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
27	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
28	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
29	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100

30	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
31	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
32	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
33	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
34	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
35	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
36	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
37	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
38	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
39	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
40	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
41	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
42	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
43	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
44	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100

45	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
46	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
47	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
48	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
49	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
50	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono sesuai SPM Bidang Sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
51	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencaan jangka menengah periode 5 (lima) tahunan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain: 1) memprioritaskan pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun lima tahun;
2. Sekretariat, Bidang Teknis dan UPT di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah harus mendukung pencapaian target Renstra, melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
3. Kerjasama dan koordinasi intensif dan berkelanjutan seluruh aparatur Sekretariat, Bidang Teknis dan UPT di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030 wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, untuk memastikan konsistensi, keselarasan dan keberlanjutan kebijakan, program dan kegiatan;
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

3. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MENURUNKAN POPULASI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

PERSENTASE PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

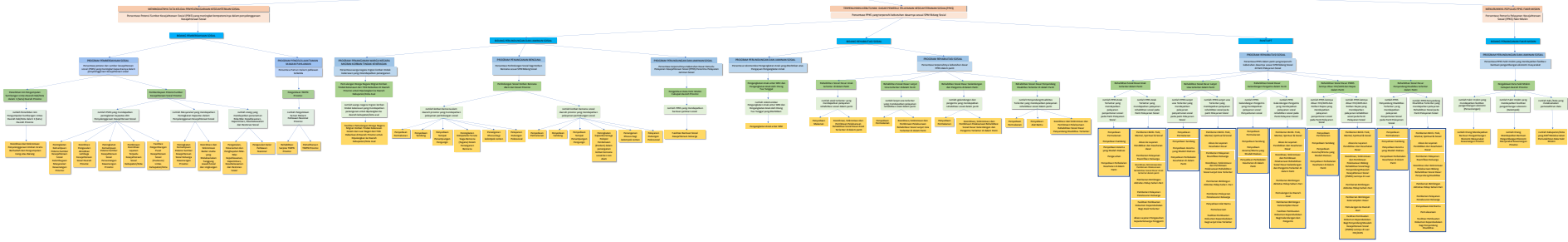

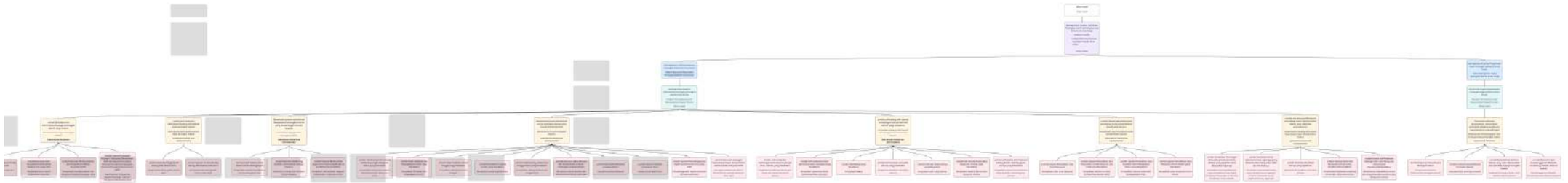

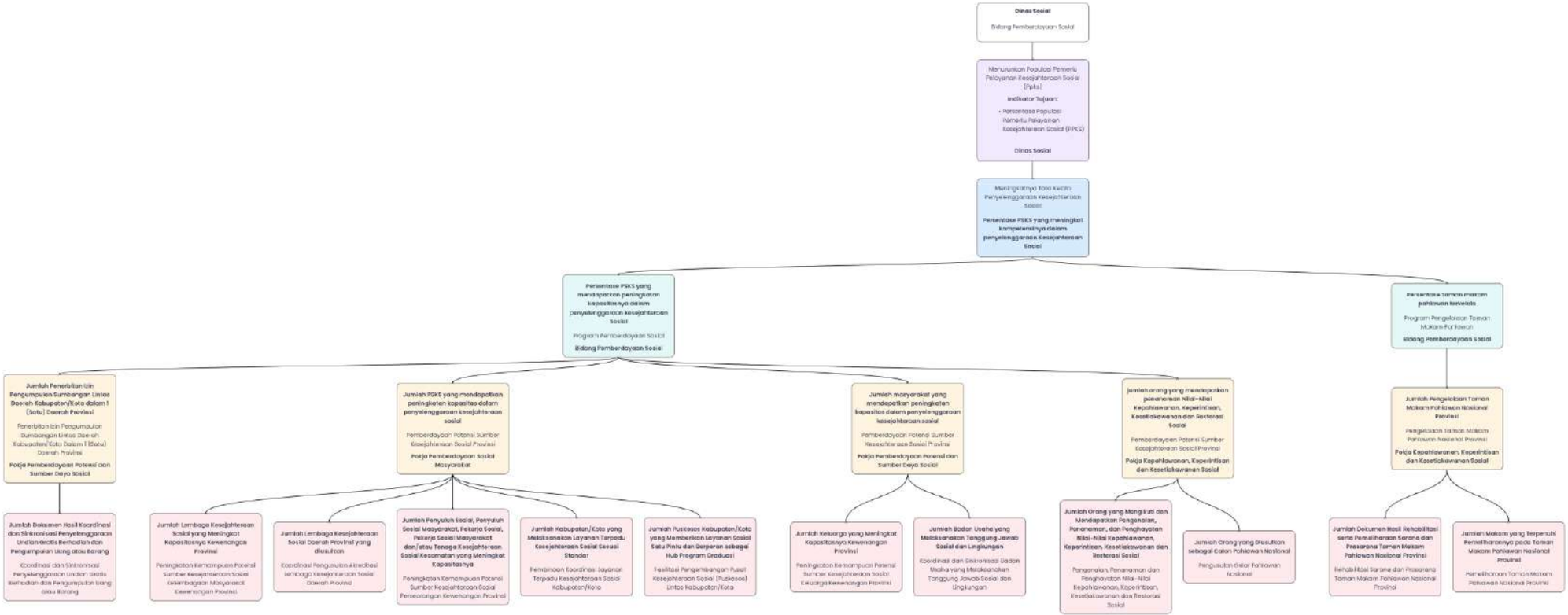
Dinas Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial
Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Indikator Tujuan:
• Persentase Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Dinas Sosial
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Program Pemberdayaan Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial
Persentase Taman makam pahlawan terkelola
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Bidang Pemberdayaan Sosial
Jumlah Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pokja Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial
Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
Pokja Pemberdayaan Sosial Masyarakat
Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
Pokja Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial
Jumlah orang yang mendapatkan penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
Pokja Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
Pokja Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan
Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi
Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Petarja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar
Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota
Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi
Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Penganatan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional
Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

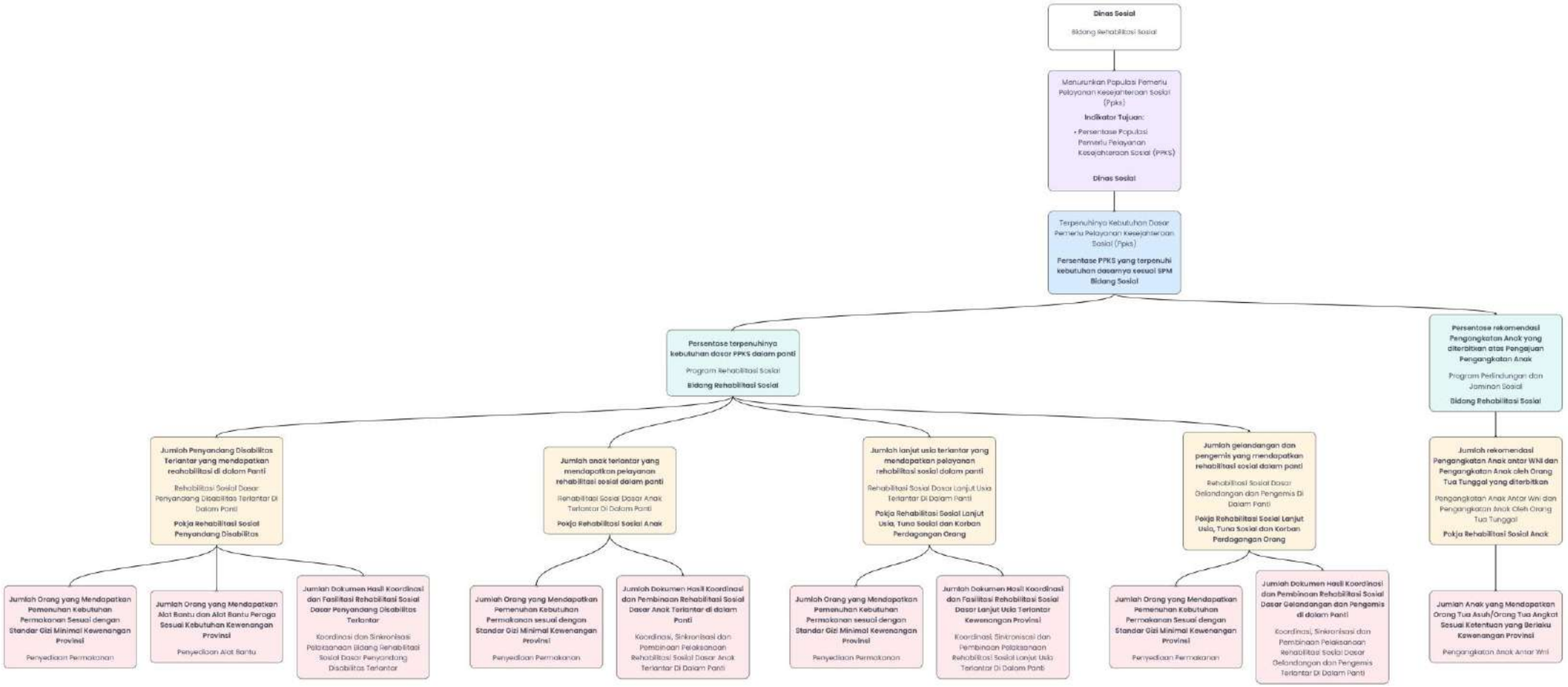
Dinas Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial
Menurunkan Populasi Pemeriu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks)
Indikator Tujuan:
• Persentase Populasi Pemeriu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Dinas Sosial
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemeriu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks)
Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM Bidang Sosial
Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti
Program Rehabilitasi Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial
Persentase rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan atas Pengajuan Pengangkatan Anak
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan reahabilitasi di dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti
Pokja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti
Pokja Rehabilitasi Sosial Anak
Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti
Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Di Dalam Panti
Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan
Pengangkatan Anak Antar Wni dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal
Pokja Rehabilitasi Sosial Anak
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
Penyediaan Permakanan
Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi
Penyediaan Alat Bantu
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
Penyediaan Permakanan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
Penyediaan Permakanan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
Penyediaan Permakanan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar Di Dalam Panti
Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi
Pengangkatan Anak Antar Wni

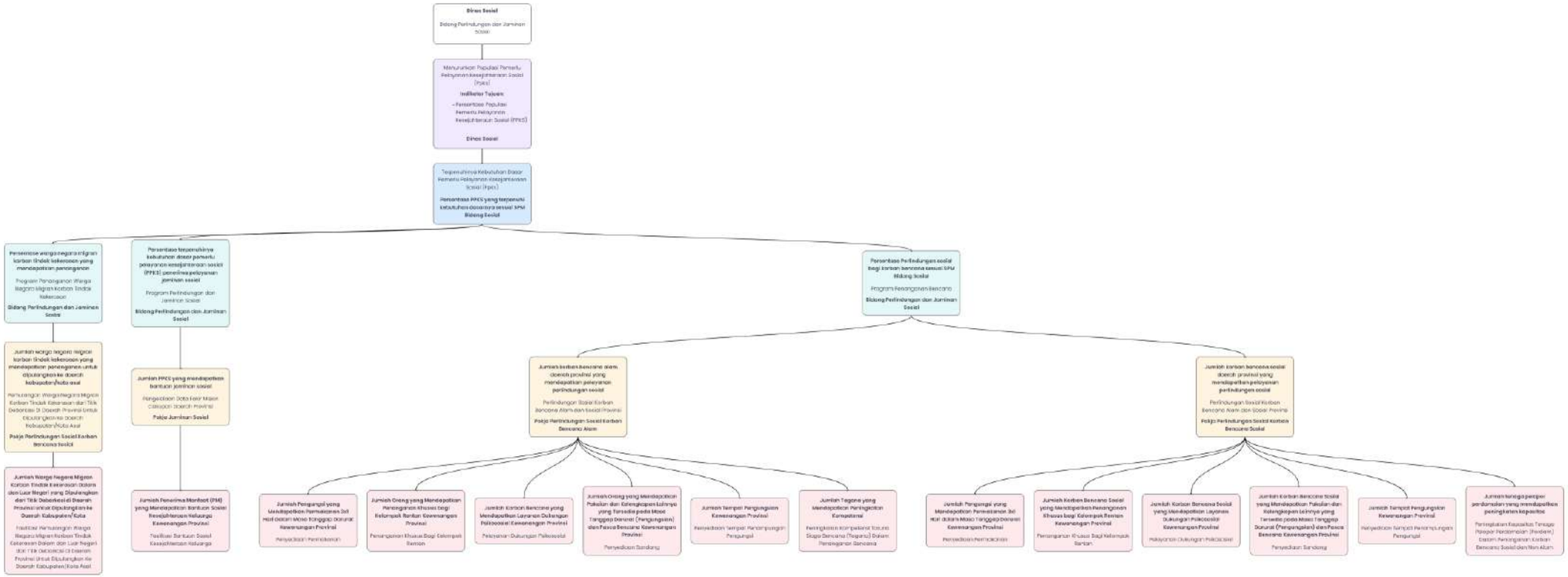
Dinas Sosial
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Menurunkan Populasi Penerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks)
Indikator Tujuan
- Persentase Populasi Penerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Dinas Sosial
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks)
Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM Bidang Sosial
Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar penerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SPM Bidang Sosial
Program Penanganan Bencana
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial
Pengadaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
Pokja Jaminan Sosial
Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dan Tiba Debarkasi Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Keluarga Kemiskinan Provinsi
Fasilitasi Bantuan Sosial Keluarga Kemiskinan Keluarga
Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Pemenuhan Air Hal dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi
Penyediaan Pemadaman
Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi
Pelayanan Dukungan Psikososial
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi
Penyediaan Sandang
Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi
Peningkatan Kompetensi Tagana Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Pemenuhan Air Hal dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi
Penyediaan Pemadaman
Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi
Pelayanan Dukungan Psikososial
Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi
Penyediaan Sandang
Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
Jumlah tenaga pekerja perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas
Peningkatan Kapasitas Tenaga Pekerja Perdamaian (Peksiar) dalam Penanganan Korban Bencana Sosial dan Non Alam

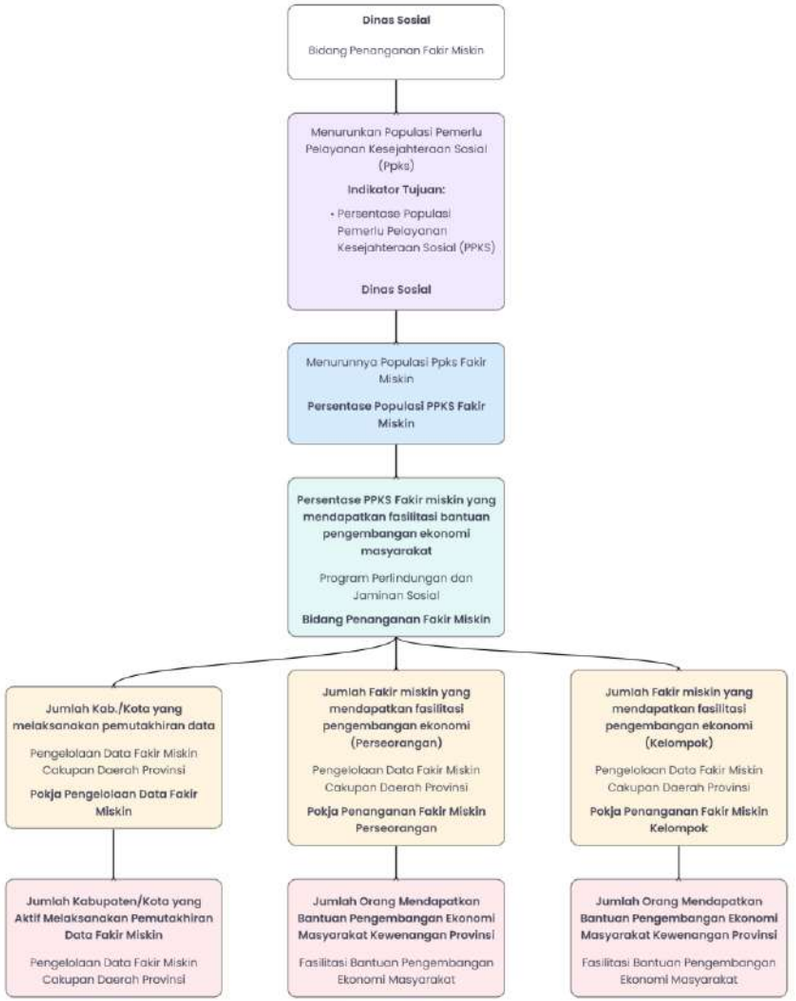
Dinas Sosial
Bidang Penanganan Fakir Miskin
Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks)
Indikator Tujuan:
• Persentase Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Dinas Sosial
Menurunnya Populasi Ppks Fakir Miskin
Persentase Populasi PPKS Fakir Miskin
Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Penanganan Fakir Miskin
Jumlah Kab./Kota yang melaksanakan pemutakhiran data
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
Pokja Pengelolaan Data Fakir Miskin
Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi (Perseorangan)
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
Pokja Penanganan Fakir Miskin Perseorangan
Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi (Kelompok)
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
Pokja Penanganan Fakir Miskin Kelompok
Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

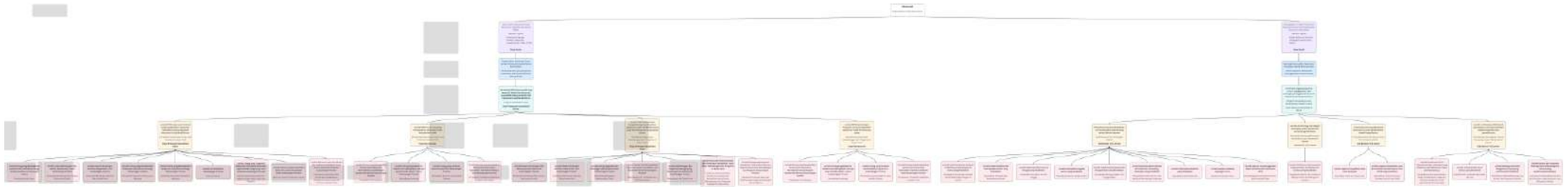

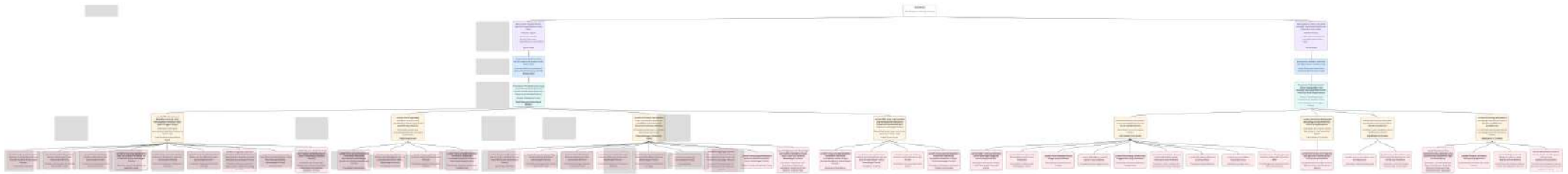

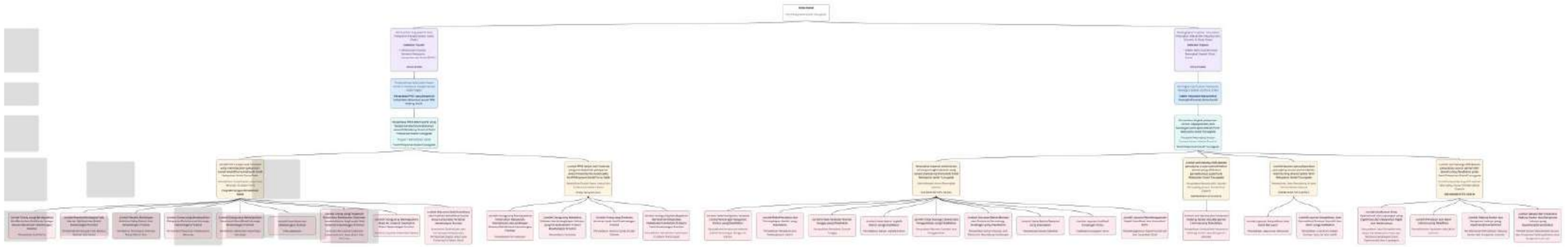

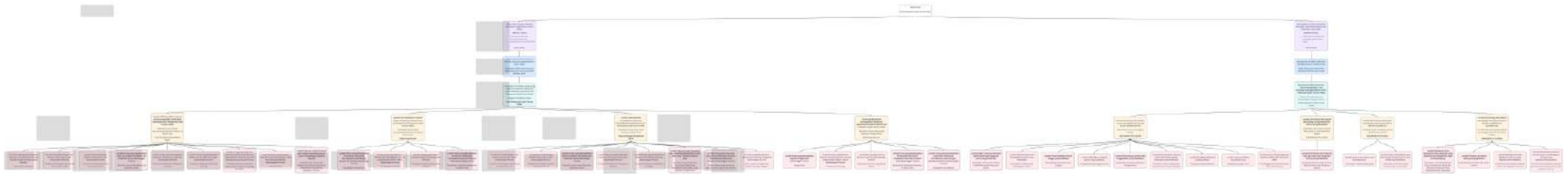

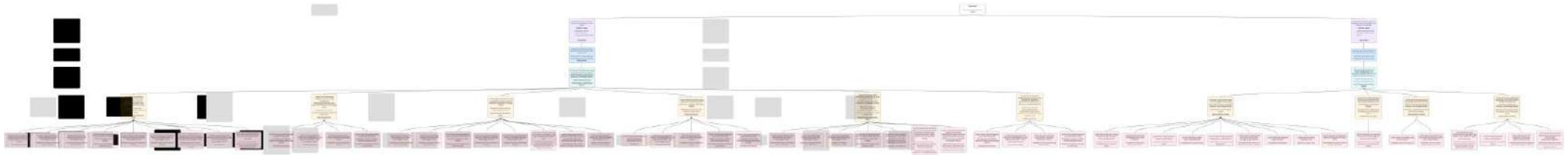

LAMPIRAN
Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 telah mengintegrasikan proses manajemen risiko yang dilakukan secara simultan. Proses Manajamen Risiko berdasarkan pada Pergub Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tahapan manajemen risiko dilakukan secara terpisah antara risiko tujuan/sasaran perangkat daerah sebagaimana terlampir dibawah ini:

A. Identifikasi Risiko

Tabel 1
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM Bidang Sosial	Kebutuhan dasar tidak terpenuhi secara merata	Risiko Strategis	Kapasitas melebihi daya tampung	Penurunan kualitas hidup PPKS	Penerima Manfaat
				Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam Panti tidak sesuai dengan SPM Bidang Sosial	Risiko Strategis	Proses rehabilitasi sosial dalam panti tidak sesuai dengan peraturan	PPKS dalam panti tidak mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial secara optimal sesuai dengan SPM Bidang Sosial	Penerima Manfaat
				Penerima Manfaat saat verval tidak sesuai dengan kriteria	Risiko Strategis	Perbedaan proses Verval DT Jateng tidak masuk prioritas P1-P3, atau DTSEN tidak termasuk kategori D1-D4	Belum semua PPKS non produktif yang masuk kategori penerima bantuan tertangani	Penerima Manfaat
2	Sasaran Strategis	Menurunnya Populasi PPKS Fakir Miskin	Persentase Populasi PPKS Fakir Miskin	Populasi PPKS tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Risiko Strategis	Lemahnya sistem pendataan dan verifikasi	Intervensi tidak tepat sasaran	PPKS, Penerima Manfaat

Tabel 1
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Terkena
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang meningkat kapasitasnya tidak sesuai target	Risiko Strategis	Lemahnya pendataan PSKS dilapangan	Terdapat PSKS yang tidak mendapatkan peningkatan kompetensi	PSKS
				PSKS yang sudah mendapatkan peningkatan kapasitas tidak menjalankan perannya secara maksimal	Risiko Strategis	Lemahnya pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PSKS tidak melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara maksimal	PPKS, Penerima Manfaat
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Panti Pelayanan Sosial/Rumah Pelayanan Sosial menurun	Risiko Strategis	Kondisi sarpras panti mengalami kerusakan dan kurang memenuhi kebutuhan penerima manfaat/masyarakat	Penerima manfaat kurang nyaman di dalam Panti	OPD, Panti Pelayanan Sosial/Rumah Pelayanan Sosial

Tabel 1
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Terkena
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Penerapan pengelolaan risiko terbatas pada pemenuhan dokumen	Risiko Strategis	Masih kurangnya pemahaman dalam mengimplementasikan pengelolaan risiko dan tindak pengendaliannya	Penerapan pengelolaan risiko belum dapat memitigasi risiko yang ada	OPD

B. Analisis Resiko

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Resiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai /belum memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kebutuhan dasar tidak terpenuhi secara merata	3	4	12	Ada	Monitoring dan evaluasi terpadu pemenuhan kebutuhan dasar secara berkala	Memadai	3	3	9

Pernyataan Resiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai /belum memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Penerima Manfaat saat verval tidak sesuai dengan kriteria	4	4	12	Ada	Melaksanakan pemantauan penyaluran jaminan sosial di Kabupaten/Kota	Memadai	3	4	12
Populasi PPKS tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	4	4	16	Ada	Meningkatkan Verifikasi dan validasi data secara berkala	Memadai	3	4	12
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Panti Pelayanan Sosial/Rumah Pelayanan Sosial menurun.	4	4	16	Ada	Meningkatkan pemeliharaan sarpras Panti Pelayanan Sosial/ Rumah Pelayanan Sosial	Memadai	3	4	12

Pernyataan Resiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai /belum memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Penerapan pengelolaan risiko terbatas pada pemenuhan dokumen	3	4	12	Ada	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengelolaan manajemen risiko melalui pelaporan pengelolaan risiko tiap semester	Memadai	3	3	9

C. Penetapan Resiko Prioritas

Tabel 3

Resiko Prioritas

Resiko Prioritas	Skala Resiko	Pemilik Resiko	Sebab	Dampak
Penerima Manfaat saat verval tidak sesuai dengan kriteria	12	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Perbedaan proses Verval DT Jateng tidak masuk prioritas P1-P3 atau DTSEN tidak termasuk kategori D1-D4	Belum semua PPKS non produktif yang masuk kategori penerima bantuan tertangani
Populasi PPKS tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	12	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Lemahnya sistem pendataan dan verifikasi	Intervensi tidak tepat sasaran

D. Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Penerima Manfaat saat verval tidak sesuai dengan kriteria	12	Perbedaan proses Verval DT Jateng tidak masuk prioritas P1-P3, atau DTSEN tidak termasuk kategori D1-D4	Belum semua PPKS non produktif yang masuk kategori penerima bantuan tertangani	Melaksanakan pemantauan penyaluran jaminan sosial di Kabupaten/Kota	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Tahun 2025-2029
Menurunnya Populasi PPKS Fakir Miskin	Persentase PPKS Fakir Miskin	Populasi PPKS tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	12	Lemahnya sistem pendataan dan verifikasi	Intervensi tidak tepat sasaran	Meningkatkan Verifikasi dan Validasi Data secara berkala	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Tahun 2025-2029

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. *Pertama,* tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan memberikan kontribusi terhadap produk domistik bruto maupun produk domistik regional bruto; *Kedua* tenaga kerja sebagai anggota kelompok masyarakat yang menjadi target untuk ditingkatkan kapasitas, ketrampilan, pendapatan dan kesejahteraannya. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Disisi lain transmigrasi juga merupakan hal penting yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat;

Sejalan dengan upaya pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum sebagai

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang termuat baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) , Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan OPD diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra OPD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut penyusunan dan penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berkenaan dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2029 dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menyusun dokumen penjabaran visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Perangkat Daerah juga menyusun dokumen Rencana Strategis perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 dengan berpedoman RPJMD.

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk jangka menengah yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,

Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dana atau urusan pilihan sesuai tugas dan pokok fungsi setiap perangkat daerah .

Dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif di Jawa Tengah, masalah yang harus kita hadapi dalam 5 tahun kedepan diantaranya adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) khususnya TPAK Perempuan yang berakibat meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) serta akan berdampak pada kinerja pembangunan Gender yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

Pembangunan ketenagakerjaan yang merupakan sasaran makro ekonomi, karena tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian baik produk domistik bruto maupun produk domistik regional bruto berpengaruh pada indikator pembangunan daerah selain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu pertumbuhan ekonomi, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Gini Ratio (Koefisien Gini : mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah atau ketimpangan ekonomi dalam masyarakat).

Salah satu indikator kinerja utama pembangunan daerah tersebut adalah Indeks Kesenjangan Gender (IKG), yang mencerminkan tingkat kesenjangan antara laki – laki dan perempuan dalam 3 (tiga) dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Pada dimensi ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menjadi salah satu komponen penting yang mempengaruhi capaian IKG. Data menunjukkan bahwa TPAK perempuan masih lebih rendah dari laki -laki (2024 : TPAK perempuan 61,82 persen dan TPAK Laki - laki 85,66 persen). Rendahnya partisipasi perempuan dalam Angkatan kerja dipengaruhi beberapa faktor , antara lain : Beban ganda perempuan yang harus membagi waktu antara pekerjaan domestik dan pekerjaan produktif, Akses terhadap peluang kerja yang belum setara,

termasuk terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan keterampilan kerja, Norma sosial budaya yang masih memandang pekerjaan tertentu lebih layak bagi laki-laki.

Pembangunan ketenagakerjaan inklusif di Jawa Tengah diarahkan tidak hanya untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas, tetapi juga untuk memastikan akses dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali pada disabilitas dan juga masyarakat rentan lainnya . Sejalan dengan agenda nasional dan komitmen daerah terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mengintegrasikan isu kesetaraan gender dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Dalam pembangunan Ketenagakerjaan yang inklusif ini harus merupakan upaya terpadu dari berbagai pihak yang mengarah pada upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia (lanjut usia), pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti perempuan, pemuda (penduduk usia muda), pekerja migran, buruh tani dan petani penggarap, nelayan, buruh industry kecil dan sektor UMKM. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Isu-isu terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan tugas yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan urusan tenaga kerja dan transmigrasi secara khusus di Jawa Tengah, oleh karenanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disesuaikan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Isu-isu lain dalam penyusunan Renstra PD diantaranya sebagai langkah tindak lanjut dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 kemudian penyesuaian terhadap kebijakan nasional (RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L Tahun 2020-2024), juga dampak dari pandemi Covid 19 dan adanya perubahan regulasi (PP 12 Tahun 2019, Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 dan pemuthakirannya Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, serta perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 5889 Tahun 2021 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah .

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Jawa Tengah menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah dan mencabut Undang- undang Nomor : 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 6856);
9. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
11. Undang -Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja .
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
19. Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional;

22. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan ;
23. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Instruksi Presiden Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017. No. 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019. No. 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019. No. 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Penyelenggaraan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP 70 Tahun 2019; Memuat RAN Penyandang Disabilitas untuk periode 5 Tahun.
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi Dan Inventarisasi Pemuthakiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi Dan Inventarisasi Pemuthakiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka panjang Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPA Nomor : 270/M.PPN/11/2021, No: SE.33/MK.02/2012, No:050/4389A/SJ dan No: SE.46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91) ;
38. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (5-66/2026), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 169);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1, tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 159 ;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor : 161)
46. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;
47. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
48. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
49. Surat Edaran Gubernur Nomor 463.23/0005918 tanggal 4 April 2023 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah.
50. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 0007/0001565 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dan Pelaksanaan Forum Perangkat

Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

51. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 0007/0001565 tanggal 26 Februari 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
52. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.7.2.2/0002764 tanggal 9 April 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Memberikan acuan landasan yang jelas bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan program pembangunan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama 5 (lima) tahun, yang disusun setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Tujuan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. Menjelaskan, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5(lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

2. Mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan sesuai misi daerah diantaranya meningkatkan kualitas dan perluasan kesempatan kerja bagi laki – laki dan perempuan, mengurangi kesenjangan partisipasi Angkatan kerja antara laki -laki dan perempuan sebagai kontribusi terhadap perbaikan IKG (Indeks kesenjangan Gender), mewujudkan lingkungan kerja yang aman, inklusif dan bebas kekerasan terutama bagi perempuan dan kelompok rentan.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja Tahunan) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan, khususnya di urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD tahun 2025 -2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum mengenai latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ; Sumber Daya Perangkat Daerah ; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Serta Permasalahan / identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigras Provinsi Jawa Tengah; dan Penentuan Isu – isu Strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TRANSMIGRASI

Berisi tentang Tujuan, Sasaran , Strategi, Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ; Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah merupakan pengelolaan terhadap resiko OPD yang diintegrasikan dalam Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang dan pendanaan indikatifnya sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan renstra OPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD; Penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan Renja OPD; Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA (Sekretaris Daerah). Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan pada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi dan Tugas Pokok, Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas;**
   Kepala dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

2. **Sekretariat;**

   Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

   Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi :

   a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;

   b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

   c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

   d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

   e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;

   f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah Daerah;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas dan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan terkait pemagangan dalam dan luar negeri, seritifikasi akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan dan pengukuran produktivitas.
b. pelaksanaan kebijakan terkait pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi, akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan dan pengukuran produktivitas;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi, akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan dan pengukuran produktivitas;
d. monitoring dan evaluasi terkait pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi, akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan dan pengukuran produktivitas; dan
e. pelaporan dan rekomendasi terkait pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi, akreditasi lembaga pelatihan kerja, uji kompetensi sumber daya manusia; dan peningkatan dan pengukuran produktivitas;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, fasilitasi pemberi kerja tenaga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah.
b. pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, fasilitasi pemberi kerja tenaga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, fasilitasi pemberi kerja tenaga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah;
d. monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, fasilitasi pemberi kerja tena-

ga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah;

e. pelaporan dan rekomendasi terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri, pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perluasan kesempatan kerja, fasilitasi pemberi kerja tenaga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas kabupaten/kota dalam Daerah dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial ; dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja.
b. pelaksanaan kebijakan terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial, dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial,; dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
d. monitoring dan evaluasi terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial,; dan pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
e. pelaporan dan rekomendasi terkait syarat kerja dan jaminan sosial, kelembagaan hubungan industrial,; dan

pengupahan dan fasilitas kesejahteraan pekerja; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas :

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan terkait pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

b. pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;

c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan

d. monitoring dan evaluasi terkait pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan;

e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1) Balai Latihan Kerja Industri Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan tenaga kerja industri. Dan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelatihan kerja berupa pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi di bidang industri.

Balai Latihan Kerja Industri Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan kerja dan pemasaran program pelatihan, dan pemasaran calon tenaga kerja yaitu pada pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang/sektor industri;

b. pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi di bidang industri;

c. pengoordinasian dalam rangka kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja di bidang industri;

d. monitoring dan evaluasi pelatihan kerja pada di bidang industri;

e. pelaporan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang industri; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Balai Latihan Kerja Jasa Dan Pariwisata Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan jasa dan pariwisata. Dan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang jasa dan pariwisata.

Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan jasa dan pariwisata;

b. penggordinasian pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi di bidang jasa dan pariwisata meliputi :

   1. pelaksanaan *training needs analysis*;

   2. kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta pemangku kepentingan terkait; dan

   3. penyesuaian kurikulum dan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri.

c. pelaporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang jasa dan pariwisata, pemasaran program pelatihan, dan penempatan alumni; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan produktivitas. Dan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan produktivitas berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan konsultansi peningkatan produktivitas serta inovasi dan kerjasama peningkatan produktivitas di kalangan masyarakat, tenaga kerja, perusahaan, dan instansi pemerintah

Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan produktivitas;

b. pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimbingan konsultansi, inovasi, dan kerjasama peningkatan produktivitas untuk masyarakat, tenaga kerja, perusahaan dan instansi pemerintah;

c. pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimbingan konsultasi, inovasi dan kerjasama peningkatan produktivitas dengan pemangku kepentingan terkait;

d. monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan, bimbingan konsultansi, inovasi, dan kerjasama peningkatan produktivitas untuk masyarakat, tenaga kerja, perusahaan dan instansi pemerintah;

e. pelaporan kegiatan pelatihan, bimbingan konsultansi, inovasi, dan kerjasama peningkatan produktivitas untuk masyarakat, tenaga kerja, perusahaan dan instansi pemerintah; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang keselamatan dan kesehatan kerja .

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional pengujian dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja;

b. pelaksanaan teknis operasional pengujian dan analisis keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, ergonomi dan psikologi kerja serta pengembangan sumber daya manusia dan konsultansi bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

c. pengoordinasian dengan pemangku kepentingan terkait keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan pengujian dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja;

d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja;

e. pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi sektor bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Dan empunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi sektor bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan kerja dan pemasaran program pelatihan, dan pemasaran calon tenaga kerja yaitu pada pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang/sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;

b. pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;

c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;

d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja pada di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;

e. pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Dan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan

Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan;

b. pelaksanaan pemeriksaan perusahaan terhadap norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan;

c. pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan;

d. evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan, meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan kelas B di Provinsi Jawa

Tengah sejumlah 6 (enam) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :

(1) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang dengan Tempat Kedudukan Kota Semarang; Wilayah Kerja : Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga.

(2) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati dengan Tempat Kedudukan Kabupaten Pati; Wilayah Kerja : Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora.

(3) Satuan Pengawasan KetenagakerjaanWilayah Surakarta dengan Tempat Kedudukan di Kota Surakarta; Wilayah Kerja : Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo.

(4) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang dengan Tempat Kedudukan Kota Magelang; Wilayah Kerja : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo.

(5) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas dengan Tempat Kedudukan Kabupaten Banyumas; Wilayah Kerja : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banjarnegara.

(6) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan dengan Tempat Kedudukan Kota Pekalongan; Wilayah Kerja : Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang.

Selengkapnya Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada Gambar berikut:

:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

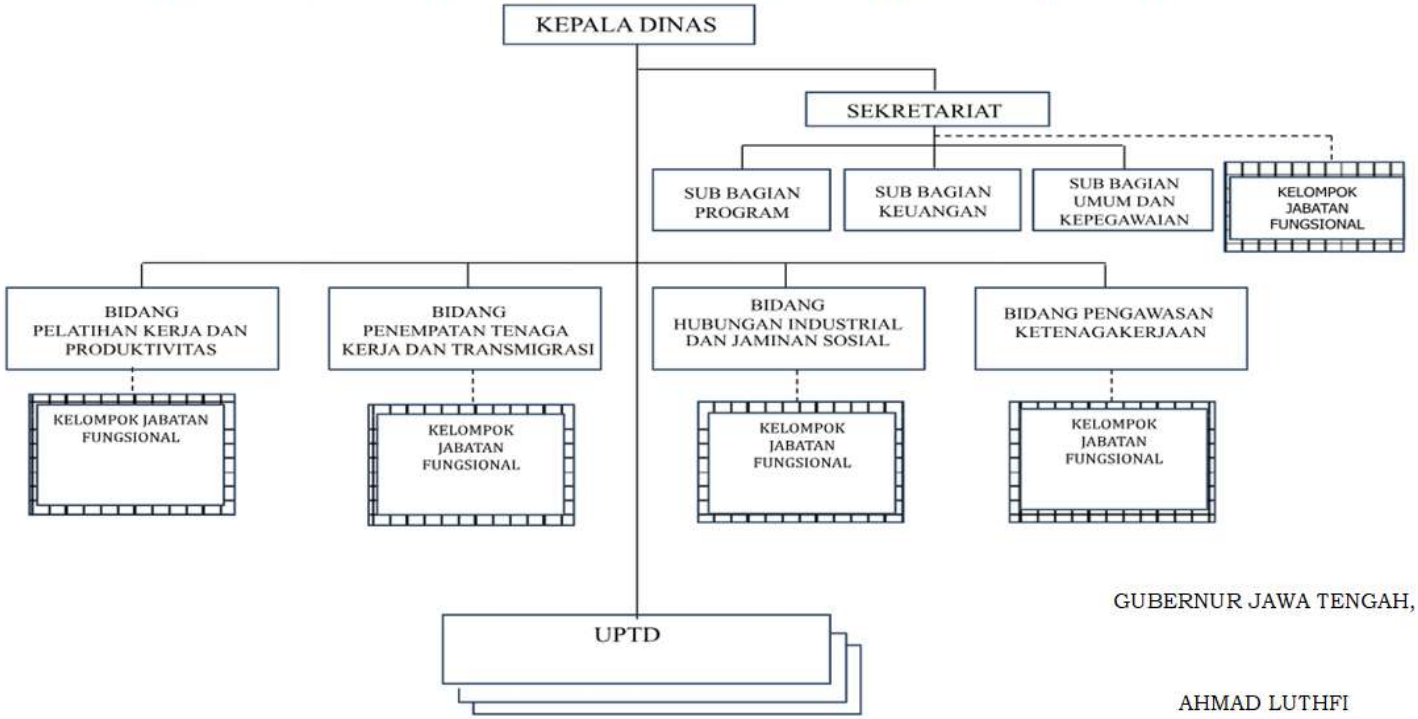

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah didukung personil/pegawai sejumlah 368 orang. Daftar jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana Gambar berikut.

Gambar 2.2.
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

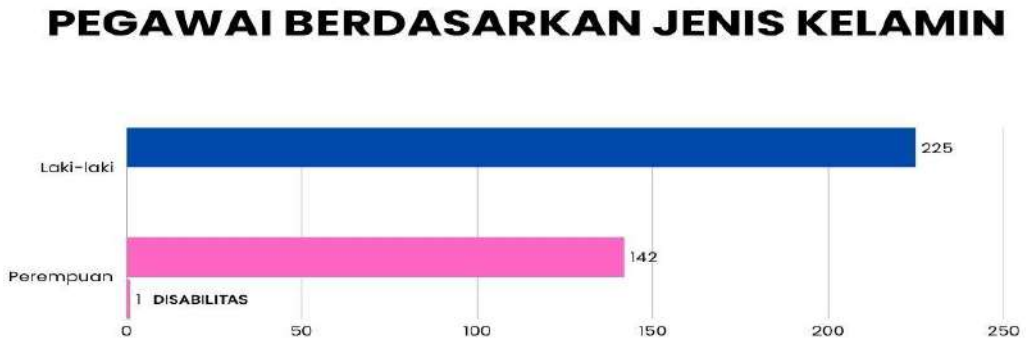

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat sebaran jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, dimana jumlah pegawai laki-laki lebih dominan yakni sebanyak 225 orang atau 61% sedangkan jumlah pegawai perempuan berjumlah 142 orang atau 38,6%. Dan termasuk 1 orang pegawai perempuan penyandang disabilitas daksa/fisik pada kaki kiri atau 0,3 % dari total pegawai. (Sumber Data : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Juni 2025)

Sementara itu, selain sebaran berdasarkan jenis kelamin, pada gambar dibawah juga terlihat sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang ada dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Gambar berikut.

Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

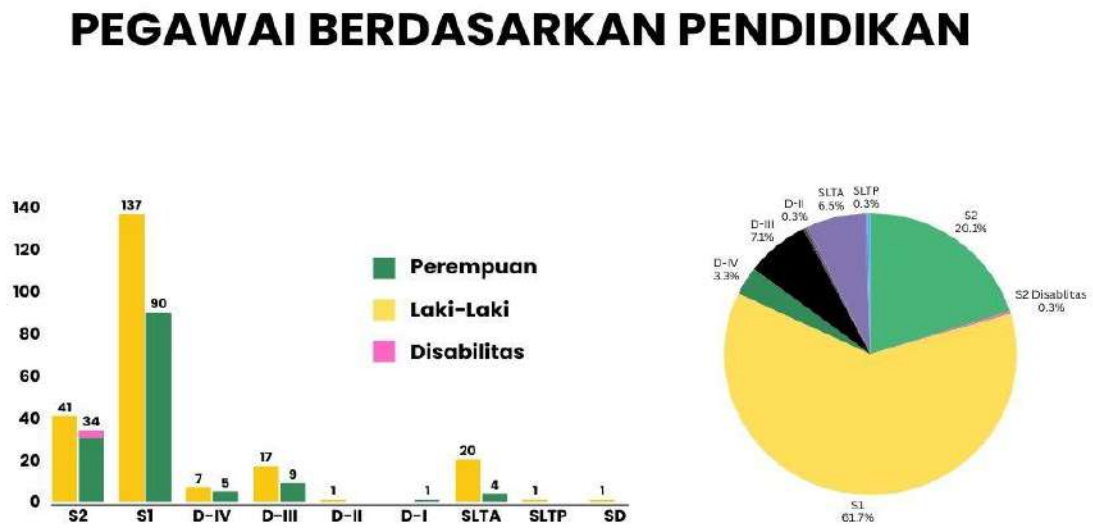

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 didominasi oleh lulusan S-1 sebanyak 227 orang pegawai (L: 137 P: 90) atau sebesar 61,7%, dan lulusan S-2 sebanyak 75 orang pegawai (L: 41 P: 34) atau 20,1% dan 1 orang pegawai perempuan penyandang disabilitas daksa/fisik berpendidikan S2 atau 0,3 %, lulusan D.III sebanyak 26 orang (L:17 P:9) atau 7,1 % dan D.IV.sebanyak 13 orang (L:7 P: 5) atau 3,3 % ; D.II sebanyak 1 orang (L) atau 0,3 % dan D. I sebanyak 1 orang (P) atau 0,3 %, serta lulusan SLTA sebanyak 24 pegawai (L:20 P:4) atau 6,5%; lulusan SLTP: 1 orang (L) dan SD :1 orang (L) . Artinya, dengan tingkat pendidikan yang baik (lulusan S-1 dan S-2), pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memiliki kompetensi secara akademis yang mendukung dalam menjalankan tugas pokok fungsinya masing masing.

Dan sebaran pegawai juga dapat dikelompokkan berdasarkan struktur seperti terlihat pada Gambar berikut :

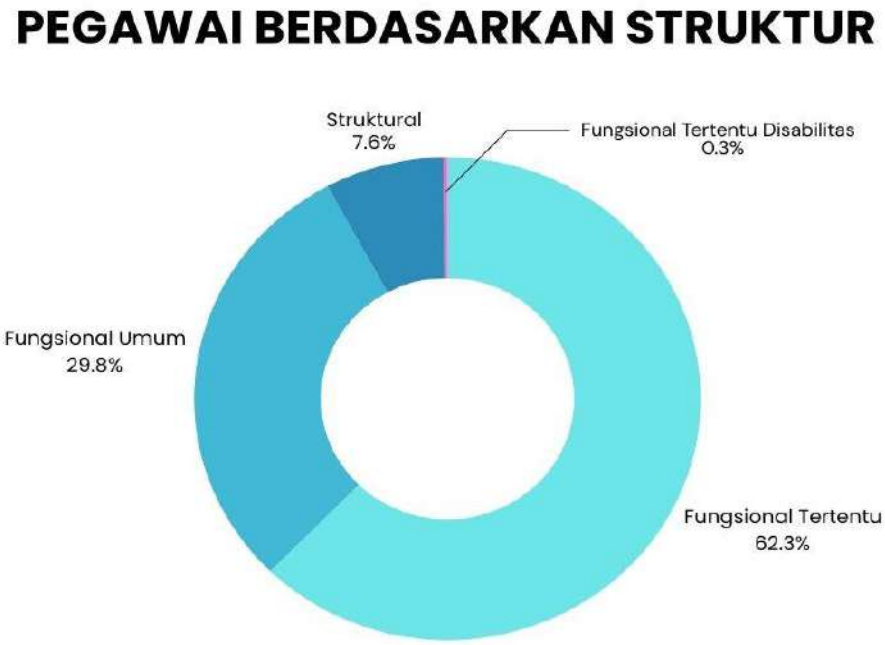

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan sebaran pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Juni 2025) berdasarkan struktur adalah sebagai berikut : Untuk Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 230 pegawai atau 62,3%. Sementara untuk Jabatan Fungsional Umum berjumlah sebanyak 110 pegawai atau 29,8% dan jabatan struktural sebanyak 28 pegawai atau 7,6 %. Dari jumlah sebaran pegawai fungsional tertentu tersebut diatas, termasuk jumlah pegawai penyandang disabilitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) orang pegawai atau 0,3 %, dengan jenis kelamin perempuan, yaitu mengalami disabilitas daksa atau disabilitas fisik pada kaki kiri .

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merupakan kondisi capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan kondisi keadaan aset dan sarana prasarana yang dimiliki.

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, termasuk gambaran keadaan Aset dan Sarana Prasarana yaitu tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi serta aset tetap lainnya dijelaskan berdasarkan realisasi capaian target Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2018-2023 berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan yang diampu, yaitu Urusan Ketenagakerjaan (Urusan Wajib) ; dan Urusan Transmigrasi (Urusan Pilihan) . Selengkapnya Aset dan Sarana Prasarana Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 s/d 2023 diuraikan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1.
Aset dan Sarana Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 s/d 2023

No	Nama Bidang Barang	Keadaan Per 31- Desember-2018		Keadaan Per 31-Desember-2019		Keadaan Per 31- Desember-2020		Keadaan Per 31- Desember-2021		Keadaan Per 31-Desember 2022		Keadaan Per 31-Desember 2023	
		Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga(Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga(Rp)
1	TANAH												
	Tanah	24	90.352.753.000	24	90.352.753.000	24	90.352.753.000	24	90.352.753.000	23	90.270.673.000	23	90.270.673.000
2	Peralatan Mesin												
	Alat Besar	30	317.786.664	27	316.916.998	27	316.916.998	27	316.916.998	17	312.979.998	10	270.290.000
	Alat Angkutan	76	3.812.240.235	92	10.488.088.115	94	10.847.576.292	95	11.005.626.292	98	11.010.526.292	85	10.907.432.292
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.774	3.795.013.548	418	3.597.089.890	418	3.597.089.890	487	3.892.906.730	489	3.936.456.730	438	2.901.144.854
	Alat Pertanian	399	2.114.340.000	131	2.103.239.925	131	2.103.239.925	133	2.148.239.925	133	2.148.239.925	135	2.148.469.925
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.575	13.661.072.347	4.664	13.299.586.603	4.831	13.614.106.603	5.054	14.589.209.603	5	14.923.261.732	4.158	12.498.910.451
	Alat Studio dan Komunikasi	273	1.657.716.018	230	1.817.205.085	242	1.834.305.085	275	2.114.108.085	277	2.120.001.631	197	1.636.623.111
	Alat Kedokteran	173	550.242.305	127	541.292.525	127	541.292.525	127	541.292.525	127	541.292.525	93	263.868.685
	Alat Laboratorium	629	7.420.529.740	397	7.890.914.043	414	8.876.396.543	442	9.111.382.743	443	9.112.204.743	346	5.439.193.575
	Alat Komputer	726	5.195.845.085	768	5.568.628.145	786	5.673.278.145	916	6.919.482.945	934	7.059.062.945	725	6.266.957.160
	Alat Peraga	1	2.336.400	1	2.336.400	1	2.336.400	17	211.718.320	17	211.718.320	12	180.761.440
	Peralatan Olah Raga			1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
	Alat Persenjataan / keamanan												
3	GEDUNG DAN BANGUNAN												
	Bangunan Gedung	117	52.562.783.646	121	53.425.462.980	132	56.660.544.130	151	57.510.532.130	152	57.876.579.430	153	58.076.672.170
	Bangunan Monumen												
	Tugu Titik/Kontrol Pasti	1											
4	Jalan dan Irigasi												

No	Nama Bidang Barang	Keadaan Per 31- Desember- 2018		Keadaan Per 31- Desember-2019		Keadaan Per 31- Desember- 2020		Keadaan Per 31- Desember- 2021		Keadaan Per 31- Desember- 2022		Keadaan Per 31- Desember- 2023	
		Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)
	Jalan dan Jembatan												
	Bangunan Air / Irigasi	1	4.317.600	1	4.317.600	1	4.317.600	1	4.317.600	1	4.317.600	2	54.487.600
	Instalasi	13	664.890.192	13	664.890.192	13	743.895.492	14	763.895.492	14	763.895.492	15	798.195.195.492
	Jaringan	5	107.706.800	5	107.706.800	5	107.706.800	5	107.706.800	5	107.706.800	3	23.236.800
5	ASET TETAP LAINNYA												
	Buku Perpustakaan	1.697	129.988.870	2.785	156.471.092	2.831	162.022.092	2.999	193.742.092	2.999	193.742.092	2.864	190.250.092
	Barang Bercorak seni dan Budaya	31	79.613.505	29	78.285.500	29	78.258.500	29	78.258.500	29	78.258.500	21	77.908.500
	Hewan Ternak dan Tanaman	6	9.500.000	6	9.500.000	6	9.500.000	6	9.500.000				
6	KONSTRUKSI DLM PENGERJAAN												
	JUMLAH KESE-LURUHAN	15.551	182.438.675.955	9.84	184.853.720.348	10.115	196.116.507.320	10.806	200.473.200.280	10.917	201.407.256.055	9.284	192.743.413.447

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat kondisi aset dan sarana prasarana per 31 Desember 2019 yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan dan irigasi, aset tetap lainnya dimana terjadi perkembangan dan penambahan nilai aset dari per 31 Desember 2018, dari Rp. 182.438.675.955,- menjadi Rp.184.853.720.348,- atau mengalami peningkatan nilai di tahun 2019 sebesar Rp.2.415.044.393,- . Pada tahun 2020 penambahan nilai aset menjadi Rp. 196.116.507.320,- (per 31 – Desember 2020) dan di tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 200.473.200.280,- (per 31 Desember 2021). Pada tahun 2022 penambahan nilai aset menjadi Rp. 201.407.256.055,- (per 31 Desember 2022) dan ditahun 2023 menurun menjadi Rp. 192.748.418.447,- (per 31 Desember 2023).

2.4 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan kondisi capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dijelaskan berdasarkan realisasi capaian target Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan yang diampu, yaitu Urusan Ketenagakerjaan (Urusan Wajib); dan Urusan Transmigrasi (Urusan Pilihan) . Selengkapnya pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan OPD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase pengangguran yang ditangani	%				25,86	27,37	28,15	28,55		10,10	19,70	28,02	29,27		0,39	0,72	1,00	1,03	
	Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai				72,00	73,00	74,00	75,00		84,25	85,25	85	84,89		1,17	1,17	1,15	1,13	
2	**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja daerah**																			
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja dilakukan Pembinaan	%				N/A	N/A	28,57	57,14		N/A	N/A	34,00	68,57		N/A	N/A	1,19	1,20	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja																			
	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%				7,09	7,39	7,89	8,19		11,08	5,34	12,20	13,65		1,56	0,72	1,55	1,67	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta)	Rp/ juta				54,59	54,60	54,61	54,62		55,01	55,91	57,11	55,47		1,01	1,02	1,05	1,02	
	Sasaran 3: Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja																			
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%				69,54	70,09	70,47	71,01		37,07	50,63	70,52	71,04		0,53	0,72	1,00	1,00	
	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Baru di Sektor Informal	%				59,00	62,00	65,00	68,00		40,05	43,42	55,26	68,11		0,68	0,70	0,85	1,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Sasaran 4: Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan Industrial dan jaminan sosial																			
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%				92,50	93,00	95,50	96,00		91,43	89,74	98,57	96,15		0,99	0,96	1,03	1,00	
	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%				87,26	87,41	87,56	87,70		96,56	97,60	97,70	98,72		1,11	1,12	1,12	1,13	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					N/A	N/A	90,56	91,07		N/A	N/A	90,83	91,07		N/A	N/A	1,00	1,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja																			
	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%				92,09	89,26	86,21	82,97		90,56	89,51	88,10	81,51		0,98	1,00	1,02	0,98	
	Sasaran 6 : Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi																			
	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%				3,38	3,39	3,40	3,41		0,00	0,79	5,28	4,44		0,00	0,23	1,55	1,30	
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian	%				0,00	2,54	3,40	3,60		0,00	0,79	3,99	4,44		N/A	0,31	1,17	1,23	
	Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai				72,00	73,00	74,00	75,00		84,25	85,25	85,00	80,00		1,17	1,17	1,15	1,07	
	Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai				74,75	75,00	75,25	75,50		78,34	77,23	80,12	83,10		1,05	1,03	1,06	1,10	
3	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**																			
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%				N/A	N/A	28,57	57,14		N/A	N/A	34	68,57		N/A	N/A	1,19	1,2	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%				7,09	7,39	7,89	8,19		4,99	5,34	12,2	13,65		0,70	0,72	1,55	1,67	
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%				33,00	35,00	37,50	38,50		5,46	3,54	37,5	38,14		0,17	0,10	1,00	0,99	
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%				3,90	4,00	4,10	4,20		0,31	0,81	4,01	4,63		0,08	0,20	0,98	1,10	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%				1,33	1,12	1,33	1,12		2,97	1,85	4,13	12,21		2,23	1,65	3,11	10,90	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%				8,33	7,69	7,69	6,67		23,07	8,16	9,44	21,22		2,77	1,06	1,23	3,18	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%				28,00	21,88	17,95	13,04		4,78	5,4	13,38	20		0,17	0,25	0,75	1,53	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran	%				33,00	25,00	20,00	16,00		16,91	46,59	68,72	78,54		0,51	1,86	3,44	4,91	
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%				1,25	1,50	2,00	2,25		1,12	0,77	2,45	5,1		0,90	0,51	1,23	2,27	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																			
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%				69,54	70,09	70,47	71,01		36,20	36,2	50,63	70,52		0,52	0,52	0,72	0,99	
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%				69,54	70,09	70,47	71,01		36,20	36,2	50,63	N/A		0,52	0,52	0,72		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%				59,00	62,00	65,00	68,00		40,05	40,05	43,42	55,26		0,68	0,65	0,67	0,81	
	Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal	%				N/A	N/A	60	71,03		N/A	N/A	70,52	73,76		N/A	N/A	1,18	1,04	
	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																			
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	%				87,26	87,41	87,56	87,70		96,56	97,60	97,70			1,11	1,12	1,12		
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%				22,00	29,00	36,00	43,00		15,65	16,02	36,24			0,71	0,55	1,01		
	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%				44,66	45,65	46,62	47,61		47,59	49,63	54,59			1,07	1,09	1,17		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%				92,50	93,00	95,50	96,00		91,43	89,74	98,57			0,99	0,96	1,03		
	Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%				23,05	23,42	23,79	24,15		24,29	24,36	N/A			1,05	1,04	N/A		
	Program Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan																			
	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%				92,09	89,26	86,21	82,97		91,92	89,51	N/A			1,00	1,00	N/A		
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%				25,29	25,54	25,89	26,14		30,56	25,55	25,90			1,21	1,00	1,00		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan	%				N/A	N/A	89,56	89,57		N.A	N/A	89,56							
	Program Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi																			
	Persentase kenaikan transmigran yang ditempatkan memiliki rumah dan lahan usaha	%				3,38	3,39	3,40	3,41		0,00	N/A	N/A			0,00	N/A	N/A		
	Persentase kenaikan calon transmigram dilatih di bidang pertanian	%				3,38	3,39	3,40	3,41		0,00	0,79	3,99			0,00	0,23	1,17		
	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%				3,38	3,39	3,40	3,41		0,00	0,79	5,28			0,00	0,23	1,55		
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian	%				3,38	3,39	3,40	3,41		0,00	0,79	3,99			0,00	0,23	1,17		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang difasilitasi	%				N/A	N/A	3,18	3,60		N/A	N/A	5,28							
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00			1,00	1,00	1,00		
B	**Renstra PD Tahun 2024-2026**																			
1	**Tujuan 1 : Meningkatkan Pengurangan Pengangguran**																			
	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%								28,6					29,86					1,04

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah																			
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Nilai								72					79,19					1,10
2	**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja daerah**																			
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%								62,85					68,57					1,09
	Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja																			
	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta/Rupiah)	Rp/juta								56					55,47					0,99

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%								9,24					13,65					1,48
	Sasaran 3: Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja																			
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%								71,04					73,66					1,04
	Sasaran 4: Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan Industrial dan jaminan sosial																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%								91,07					91,07					1,00
	Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja																			
	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%								81,53					81,51					1,00
	Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Indeks Manajemen Risiko	Angka								3,01					2,96					0,98
	Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka								85,1					87,5					1,03
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA																			
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%								62,85					68,57					1,09
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%								38,14					38,14					1,00
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%								4,4					4,53					1,03
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%								2,3					5,1					2,22
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%								2,88					12,21					4,24
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%								9,45					21,22					2,25

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	%								13,13					20					1,52
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%								46,9					78,54					1,67
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																			
	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	%								45,05					73,76					1,64
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%								68,1					68,11					1,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL																			
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%								98					98,72					1,01
	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%								49,75					49,75					1,00
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%								44,27					44,33					1,00
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%								96,15					98,78					1,03
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN																			
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%								89,58					89,91					1,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%								26,4					26,4					1,00
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI																			
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%								3,61					4,4					1,22
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%								3,61					4,4					1,22
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																			
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%								100					100					1,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	**Tujuan 1 : Mengurangi jumlah pengangguran**																			
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					1,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 20 (duapuluh) Indikator target kinerja urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 20 (duapuluh) indikator RPJMD yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan evaluasi hasil perencanaan pada tahun 2019-2024, dari 20 (duapuluh) indikator sebanyak 20 (duapuluh) indikator telah tercapai, dalam artian semua target indikator pada tahun 2024 telah tercapai seluruhnya.

Tabel 2.5.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada tahun 2020 sd 2024					APBD pada tahun 2020 sd 2024					Realisasi Anggaran Tahun 2020 sd 2024				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pendapatan						5.375.000.000	4.250.000.000	3.500.000.000	2.901.250.000	4.844.220.000	5.915.605.528	5.632.189.040	2.538.422.500	2.896.179.000	7.140.605.085
2	Belanja		137.198.821.000	101.320.993.000	111.000.000.000	135.991.940.000	95.236.787.000	100.753.877.000	99.020.993.000	108.951.470.000	121.142.670.000	92.095.777.971	96.399.253.357	96.072.012.396	102.120.454.634	116.741.463.646
3	Pembiayaan															

Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun 2020 sd 2024 (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
19	20	21	22		23	24
110,06	132,52	72,53	99,83	147,40	- 10.615.600.000	24.499.991.140
96,70	95,68	97,02	93,73	96,37	518.117.660.000	492.913.713.500

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tenaga Tahun 2019-2023 mengalami penurunan, yaitu realisasi Belanja pada tahun 2019 sebesar Rp. 120.869.395.717,- (94,24 % dari alokasi anggaran sebesar Rp.128.258.917.000,-), tahun 2020 menjadi Rp.92.095.777.971.000,- (96,7% dari alokasi anggaran sebesar Rp.95.236.787.000,-), sedangkan realisasi belanja pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp.96.399.253.971.000,- (95,68 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 100.753.877.000,-), dan ditahun 2022 realisasi belanjanya menjadi Rp.96.072.012.396 (97,02 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 99.020.993,-), ditahun 2023 realisasi belanja menurun menjadi Rp.15.544.808,314 (13,58 dari alokasi anggaran sebesar Rp114.451.470,-), tahun 2024 realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah meningkat menjadi sebesar Rp. 116.741.463.000 (dari alokasi anggaran sebesar Rp. 121.142.670.000).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah juga telah berkomitmen mengintegrasikan isu kesetaraan gender dalam setiap kebijakan, program dan sub kegiatan yaitu dengan diarahkan dan dimplementasikan untuk mengalokasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.261.753.000,- (7,8 persen) dari total anggaran Perangkat Daerah setelah dikurangi belanja pegawai sebesar Rp. 54.529.471.000,-. Dan untuk alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) meningkat pada tahun 2025 menjadi 15,18 persen yaitu sebesar Rp. 13.044.138.000,- (15,18 persen) dari total anggaran dikurangi belanja pegawai sebesar Rp 85.950.127.000,- yaitu pada beberapa Program yang langsung untuk masyarakat yang sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
c. Progrram Penempatan Tenaga Kerja
d. Program Hubungan Industrial
e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pengembangan pelayanan

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan berikut ini.

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa data ketenagakerjaan, program pembangunan bisa kurang tepat dalam pelaksanaannya. Ketersediaan data ketenagakerjaan yang semakin lengkap dan tepat akan memudahkan pemerintah dalam membuat rencana pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Jawa Tengah dibutuhkan sekali data mengenai jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Penduduk Usia Kerja (*working age population*) di Provinsi Jawa Tengah menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2024 tercatat berjumlah 29.712.182 orang terdiri dari Penduduk Usia Kerja (PUK) tidak memiliki Disabilitas berjumlah 28.939.798 orang dan yang memiliki disabilitas berjumlah 772.384 orang. Bila dirinci menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja perempuan tercatat sebanyak 14.860.118 orang atau 50,01 persen dari total penduduk usia kerja di Jawa Tengah. Jumlah tersebut sedikit lebih banyak bila dibanding dengan penduduk usia kerja laki-laki yang tercatat sebanyak 14.852.064 orang (49,99 persen).

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. PUK cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Jawa Tengah, yaitu di tahun 2024 sebanyak 37.892.282 orang lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk di tahun 2023 sejumlah 37.540.900 orang. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 29,71 juta orang, meningkat sebanyak 334,55 ribu orang dibandingkan Agustus 2023 (tabel 2.6). Sebagian besar PUK merupakan angkatan kerja yaitu 21,91 juta orang, sedang sisanya termasuk dalam bukan angkatan kerja sebanyak 7,80 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri atas 20,86 juta orang penduduk yang bekerja dan 1,05 juta orang pengangguran. Sementara itu, komposisi angkatan kerja pada Agustus 203 terdiri atas 19,99 juta orang penduduk bekerja dan 1,08 juta orang pengangguran. Artinya terdapat kenaikan angkatan kerja sebanyak 839.71 juta orang, kenaikan jumlah penduduk bekerja sebanyak 872,52 juta orang dan penurunan pengangguran sebanyak 32,81 juta orang pada periode tersebut. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di

suatu wilayah. Dalam kurun waktu Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024, TPAK Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 73,74 persen, meningkat sebesar 2,02 persen poin dibanding Agustus 2023. Jika dilihat berdasarkan kategori jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 85,66 persen. Lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 61,82 persen. Apabila dibandingkan pada periode Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,14 persen poin. Begitu pula dengan TPAK perempuan yang mengalami kenaikan sebesar 2,90 persen poin. GAP Gender (Kesenjangan) antara TPAK laki –laki dan perempuan tahun 2024 sebesar 23,84 persen, lebih baik dari pada GAP Gender tahun 2023 sebesar 25,60 persen . Dan TPAK yang tidak memiliki disabilitas tahun 2024 sebesar 75,16 persen, TPAK memiliki disabilitas sebesar 20,28 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persen. Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Jawa Tengah. TPT di Jawa Tengah pada Agustus 2024 tercatat sebesar 4,78 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat hampir sekitar 5 orang yang menganggur. Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih rendah dari pada TPT Laki-Laki, tercatat masing-masing sebesar 4,71 persen dan 4,83 persen. TPT di Jawa Tengah pada Agustus 2024 tersebut lebih baik dari TPT pada Agustus Tahun 2023 tercatat sebesar 5,13 persen, yang terdiri TPT laki – laki sebesar 5,43 persen dan TPT perempuan sebesar 4,69 persen.

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bila dilihat berdasarkan Data Disabilitas pada tahun 2024 adalah TPT yang tidak memiliki Disabilitas sebesar 4,77 persen (laki – laki : 4,82 persen dan perempuan : 4,71 persen) dan TPT memiliki Disabilitas sebesar 6,00 persen (laki – laki : 5,86 persen dan perempuan : 6,31 persen). Bila TPT dilihat menurut Data Disabilitas, maka TPT yang tidak memiliki disabilitas pada tahun 2024 sebesar 4,77 persen lebih baik dari TPT yang tidak memiliki Disabilitas tahun 2023 yaitu sebesar 5,12 persen. Bila berdasarkan jenis kelamin, TPT yang tidak memiliki disabilitas untuk laki – laki di tahun 2024 tercatat 4,82 persen lebih baik dari tahun 2023 yaitu sebesar 5,45 persen, tetapi untuk perempuan tercatat 4,70 persen lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 4,65 persen atau meningkat 0,05

poin. Untuk TPT memiliki disabilitas pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,00 persen lebih baik dari pada tahun 2023 sebesar 6,07 persen dan tahun 2024 TPT memiliki disabilitas laki – laki tercatat 5,86 persen lebih rendah daripada perempuan 6,31 persen. Tetapi bila dibandingkan dengan TPT memiliki disabilitas tahun 2023 (laki – laki tercatat 3,12 persen , dan perempuan 10,14 persen), maka TPT memiliki disabilitas untuk untuk laki-laki tahun 2023 lebih rendah atau lebih baik dari tahun 2024, tetapi untuk TPT memiliki disabilitas perempuan tahun 2024 sebesar 6,31 persen lebih baik atau lebih rendah dari tahun 2023 yaitu sebesar 10,14 persen.

Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mampunya pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Hal ini terutama terjadi di daerah perkotaan dimana antara permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak seimbang.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu wilayah. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) diukur sebagai persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja. Dalam pengertian ”kesempatan kerja” tidaklah sama dengan “lapangan kerja yang masih terbuka”. Di Provinsi Jawa Tengah, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada bulan Agustus 2024 sebesar 95,22 persen, berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja sekitar 95 orang mempunyai kegiatan bekerja atau sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu sekitar 5 orang.

Untuk Tingkat kesempatan Kerja (TKK) tidak memiliki disabilitas (%) tahun 2024 sebesar 95,23 persen, lebih baik dari tahun 2023 sebesar 94,88 persen, berarti dari 100 orang angkatan kerja , sekitar 95 orang yang bekerja atau atau sementara yang tidak bekerja selama seminggu yang lalu sekitar 5 orang. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) memiliki disabilitas (%) tahun 2024 sebesar 94,00 persen, lebih baik dari tahun sebesar 2023 sebesar 93,93 persen, berarti dari 100 orang angkatan kerja, sekitar 94 orang yang bekerja dan atau sementara yang tidak bekerja selama seminggu yang lalu sebesar 6 persen. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja (BAK) Tahun 2024 sejumlah 7.803.338 orang (laki – laki : 2.129.458 dan perempuan :5.673.880), jumlahnya meningkat dibandingkan Bukan Angkatan Kerja (BAK) tahun 2023 : 8308.494 orang (laki-laki:2.273.363 dan perempuan: 6.035.131). Gambaran data umum ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sebagaimana tabel dibawah ini. .

Tabel 2.6

Data Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan 2024

K A T E G O R I	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Penduduk	18.866.400	18674500	37.540.900	19.037.742	18.854.541	37.892.283
Penduduk Bukan Usia Kerja (PBUK)	**4.179.586**	**3.983.685**	**8.163.271**	**4.185.678**	**3.994.423**	**8.180.101**
Penduduk Usia Kerja (PUK : 15 tahun keatas)	**14.686.814**	**14.690.815**	**29.377.629**	**14.852.064**	**14.860.118**	**29.712.182**
Penduduk Usia Kerja (PUK : 15 tahun keatas)	**14.686.814**	**14.690.815**	**29.377.629**	**14.852.064**	**14.860.118**	**29.712.182**
PUK tidak memiliki Disabilitas	14.358.484	14.311.408	28.669.892	14.471.362	14.468.436	28.939.798
PUK memiliki Disabilitas	328.330	379.407	707.737	380.702	391.682	772.384
a. Angkatan Kerja (AK)	**12.413.451**	**8.655.684**	**21.069.135**	**12.722.606**	**9.186.238**	**21.908.844**
a.a) A K tidak memiliki Disabilitas	12.322.510	8.589.452	20.911.962	12.614.989	9.137.179	21.752.168
a.b) A K memiliki Disabilitas	90.941	66.232	157.173	107.617	49.059	156.676
1) Bekerja	**11.739.366**	**8.249.509**	**19.988.875**	**12.107.961**	**8.753.432**	**20.861.393**
1.a) Bekerja tidak memiliki Disabilitas	11.651.259	8.189.991	19.841.250	12.006.652	8.707.471	20.714.123
1.b) Bekerja memiliki Disabilitas	88.107	59.518	147.625	101.309	45.961	147.270
2) Pengangguran Terbuka (PT)	**674.085**	**406.175**	**1.080.260**	**614.645**	**432.806**	**1.047.451**
2.a) P T tidak memiliki Disabilitas	671.251	399.461	1.070.712	608.337	429.708	1.038.045
2.b) P T memiliki Disabilitas	2.834	6.714	9.548	6.308	3.098	9.406
b. Bukan Angkatan Kerja (B A K)	**2.273.363**	**6.035.131**	**8.308.494**	**2.129.458**	**5.673.880**	**7.803.338**
b.a) B A K tidak memiliki Disabilitas	**2.035.974**	**5.721.956**	**7.757.930**	**1.856.373**	**5.331.257**	**7.187.630**
b.b) B A K memiliki Disabilitas	**237.389**	**313.175**	**550.564**	**273.083**	**342.623**	**615.706**
a) Sekolah	945.665	987.978	1.933.643	964.874	1.020.248	1.985.122
b) Mengurus Rumah Tangga	508.391	4.579.887	5.088.278	494.561	4.215.624	4.710.185
c) Lainnya	819.307	467.266	1.286.573	670.023	438.008	1.108.031

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	**84,52**	**58,92**	**71,72**	**85,66**	**61,82**	**73,74**
Gender GAP (antara TPAK Laki-laki dan Perempuan)	**25,60**			**23,84**		
TPAK tidak memiliki Disabilitas (%)	85,82	60,02	72,94	87,17	63,15	75,16
TPAK memiliki Disabilitas (%)	27,70	17,46	22,21	28,27	12,53	20,28
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	**5,43**	**4,69**	**5,13**	**4,83**	**4,71**	**4,78**
TPT tidak memiliki Disabilitas (%)	5,45	4,65	5,12	4,82	4,70	4,77
TPT memiliki Disabilitas (%)	3,12	10,14	6,07	5,86	6,31	6,00
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	**94,57**	**95,31**	**94,87**	**95,17**	**95,29**	**95,22**
TKK tidak memiliki disabilitas (%)	94,55	95,35	94,88	95,18	95,30	95,23
TKK memiliki disabilitas (%)	96,88	89,86	93,93	94,14	93,69	94,00

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah dan Pusdatik Kemnaker RI Tahun 2023 dan 2024 (data diolah)

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan kondisi capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diuraikan sebagai berikut:

Pencari kerja yang ditempatkan selama periode Tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2018 ditempatkan sebanyak 167.247 orang meningkat menjadi 210.889 orang ditahun 2019. Namun terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 81.835 karena Pandemi Covid meningkat di tahun 2021 sebesar 136.611 orang , menjadi 227.088 di tahun 2022. ditahun 2023 mengalami peningakatan menjadi 236,491 orang dan ditahun 2024 mengalami penurunan menjadi 233.767 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah yang ditempatkan sesuai kompetensinya dipasar kerja. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel.2.7
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2024 (%)

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2018	240.246	167.247	69,61
2019	300.098	210.889	70,27
2020	220.763	81.835	37,07
2021	269.810	136.611	50,63
2022	322.041	227.088	70,52
2023	332.644	236.491	71,09
2024	316.940	233.767	73,76

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Sedangkan secara makro di Provinsi Jawa Tengah, masih tinggi jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang merupakan Angkatan kerja Kelompok Usia Muda yang sedang tidak sedang bekerja, tidak Sekolah atau mengikuti pelatihan (NEET) .

Not in Employment, Education or Training (NEET) adalah penduduk usia 15 - 24 tahun (Angkatan Kerja kelompok umur muda) yang sedang tidak bekerja, tidak sekolah atau mengikuti pelatihan . Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2021 : 1.097.209 orang meningkat menjadi 1.101.412 orang di tahun 2022 , dan tahun 2023 menjadi 1.185.589 orang dan menurun di tahun 2024 menjadi 1.009.075 orang dan gambaran jumlah *Not in Employment, Education or Training* (NEET) di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut .

Tabel 2.8
Jumlah *Not In Employment, Education or Training (NEET)* di Jawa Tengah
Tahun 2021 - 2024

No	Tahun	*Not in Employment, Education or Training*		Jumlah *NEET* (Orang)	Penduduk Usia Kerja Muda 15-24 tahun)		Jumlah Penduduk Usia Muda (Orang)	Persentase NEET		Persentase NEET
		Laki-laki	Perempuan		Laki - laki	Perempuan		Laki - laki	Perempuan	
1	2021	489.883	607.326	1.097.209	2.756.403	2.643.769	5.400.172	18	23	20
2	2022	492.275	609.137	1.101.412	2.752.808	2.636.652	5.389.460	18	23	20
3	2023	548.538	637.051	1.185.589	2.908.664	2.740.087	5.648.751	19	23	21
4	2024	450.476	558.599	1.009.075	2.897.689	2.729.347	5.627.036	16	20	18

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021,2022,2023,2024 (data diolah)

Jumlah NEET berdasarkan jenis kelamin tersebut lebih banyak didominasi oleh perempuan. Hal tersebut menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat sekelompok orang yang termasuk dalam angkatan kerja atau kelompok usia muda, yang bila fenomena NEET secara masif dan berkepanjangan akan berpotensi memberikan dampak negatif yang lebih besar, baik pada diri dan lingkungannya serta berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja. Produktivitas rendah, karena banyaknya jumlah NEET yang mengakibatkan hilangnya kesempatan mereka untuk menghasilkan output yang meningkatkan pendapatan daerah dan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan terbatasnya penyerapan tenaga kerja baru dan tantangan transisi sekolah ke dunia kerja . Rendahnya penyerapan diperparah oleh ketimpangan wilayah; peluang kerja banyak tersentralisasi di kota besar, sementara di daerah lain , pemuda kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Pada lingkup keluarga, NEET akan mengalami ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga. Pada ruang lingkup yang lebih luas yaitu dalam kehidupan bermasyarakat , NEET dianggap sebagai sekompok orang yang tidak hanya membahayakan stabilitas negara tetapi juga merusak tatanan masyarakat yang dapat berdampak terburuk yang mungkin terjadi adalah terhambatnya roda perekonomian suatu negara terlebih pada negara yang memiliki penduduk usia muda yang tinggi dan negara harus mengimpor Tenaga kerja (TKA) untuk membantu proses pelaksanaan industri, pembangunan dan perekonomian di daerah atau wilayah / negara. Hal – hal tersebut merupakan beberapa permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berikut pemetaan permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi sebagaimana tabel berikut ini .

Tabel 2.9.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**Tenaga Kerja**		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi di Provinsi Jawa Tengah	1) Ketidaksesuaian keterampilan (***Skill Mismatch***) dari lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang mendominasi pengangguran di Jawa Tengah . 2) Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka lulusan SMK tahun 2024 : 9,52 persen atau 331.152 orang dan penganggur muda (15 th sd 29 tahun) : 66,22 persen atau 693.687 orang , sedangkan jumlah penganggur terbuka sebanyak : 1.047.451 orang yang mencermin- kan ketidak sesuaian keterampilan (***Skill Mismatch***) antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan Industri .	a. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 didominasi oleh golongan umur 15 -24 tahun (51,06 persen), yang pada dasarnya golongan umur tersebut merupakan generasi Z yang memiliki kecenderungan untuk memilih lingkungan kerja yang lebih fleksibel, baik jam kerja maupun lokasi kerja. Sehingga mereka lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki budaya kerja yang positif dan cenderung meninggalkan pekerjaan apabila beban kerja terlalu tinggi . b. Pertumbuhan ekonomi yang relative stagnan (2024 sebesar 4,95 persen), diperkirakan pertumbuhan ekonomi 1 persen akan menyerap tenaga kerja kita – kira 250 ribu orang . c. Tingginya Turn Over Tenaga Kerja Muda d. Metode penghitungan TPT adalah perbedaan usia angkatan kerja yang dilakukan survei oleh BPS adalah 15 tahun , sedangkan usia bekerja di perusahaan adalah 18 tahun e. Kurikulum , sarana dan prasarana (alat praktek) dan pelatihan di SMK tidak sesuai dengan kondisi DUDIKA

			(Dunia Usaha , Dunia Industri dan Dunia kerja) saat ini . f. Tenaga pengajar SMK /guru SMK masih terdapat 408 guru atau 56,20 persen yang belum memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Total guru 726 dari 11 SMK yang diuji petik oleh BPKP) g. Kurangnya pelatihan ***softskill*** dan ***hardskill*** h. Balai Latihan Kerja belum bisa menampung pencari kerja yang berminat mengikuti pelatihan vokasi, karena keterbatasan kuota pelatihan
		3) Penyerapan tenaga kerja atau penduduk yang bekerja golongan umur 15 sd 29 tahun masih rendah (22,49 persen) dan pengangguran usia muda (15 sd 29 tahun) masih tinggi : 66,22 persen atau 693.687 orang .	a. Pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari penciptaan lapangan kerja baru (terjadi peningkatan pengangguran, terutama pada usia muda dan lulusan baru), diantaranya ditunjukkan banyaknya jumlah NEET : 17,93 persen dari Penduduk Usia Kerja (PUK) gol umur 15 -24 tahun. Hal tersebut mencermin-kan ketidak mampuan pertumbuhan ekonomi menyerap lonjakan Angkatan kerja. b. Adanya *mismatch* atau ketidak sesuaian keterampilan antara dunia Pendidikan dan dunia usaha , yang menyebabkan tidak terserapnya mereka dalam pasar kerja . c. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja tidak mampu diakses oleh Generasi Z , karena jenis pelatihannya harus sesuai dengan karakteris-

			tik Gen Z . d. Upaya peningkatan kualitas SDM melalui jenjang Pendidikan tidak diantisipasi dengan ketersediaan lapangan kerja yang layak untuk level Pendidikan yang tinggi. e. Akses informasi pasar kerja belum merata , terbatasnya *job matching* digital dan kurangnya peluang kerja di daerah rural /pedesaan f. Masih banyaknya penduduk usia kerja umur 15-49 tahun tidak mampu untuk mengakses internet g. *Missmatch* geografis dan sektoral yaitu ketidaksesuaian antara lokasi ketersediaan kerja dan domisili pencari kerja , serta jenis keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan sektor usaha h. Masih tingginya Penduduk Yang Bekerja dengan status pekerja keluarga (pekerja tak dibayar) tahun 2024 yaitu sebanyak 2.672.660 orang (12,81 persen) yaitu Laki-laki 699.534 orang (26,17 persen) dan perempuan1.973.126 (73,82 persen) i. Fragmentasi data dan kesenjangan informasi pasar kerja sehingga jumlah pencari kerja yang terdaftar dengan system pasar kerja baik di Kemnaker dan di Disnakertrans Jateng sedikit jika dibandingkan dengan angka pengangguran (BPS) j. Kapasitas jumlah pegawai pengantar kerja terbatas yaitu 160 orang

			dibandingkan jumlah perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan di WLKP Online 13.406 perusahaan di tahun 2024.
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan penyandang disabilitas masih rendah di Jawa Tengah, yang mengindikasikan bahwa rendahnya persentase angkatan kerja atau persediaan tenaga kerja perempuan terhadap Penduduk Usia Kerja (PUK) yang aktif secara ekonomi.	1) Partisipasi kerja perempuan dan penyandang disabilitas masih rendah , akibat dipengaruhi beberapa factor, antara lain: a. Beban ganda perempuan yang harus membagi waktu antara pekerjaan domestic dan pekerjaan b. Akses terhadap peluang kerja belum setara , diskriminatif , termasuk terbatasnya akses untuk mendapatkan pelatihan dan keterampilan. c. Norma sosial budaya yang masih memandang pekerjaan tertentu lebih layak bagi laki – laki . 2) Rendahnya penyandang disabilitas yang bekerja tahun 2024 di sektor formal 15,14 persen (22.306 orang), hal ini akibat dipengaruhi sebagai berikut : a. Kurangnya akses terhadap pendidikan dasar atau penyetaraan dan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor formal atau perusahaan b. Perusahaan telah menginfokan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas , tapi yang lolos verifikasi atau memenuhi sedikit , penyebabnya karena kualitasnya rendah dan banyak yang penyandang disabilitas tidak punya ijasah penyetaraan atau ijasah SD . c. Belum adanya data profil Penyandang	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 : 73,74 persen dan Gender GAP atau kesenjangan Gender tahun 2024 : 23 , 84 persen lebih baik dari tahun 2023 : 25,60 persen b. TPAK laki -laki lebih besar dari perempuan dan TPAK perempuan cenderung meningkat , sehingga Gender Gap atau kesenjangan gender semakin menurun . c. Penduduk usia kerja (PUK) di Jawa Tengah 2024 tingkat pendidikannya rendah yaitu SD (40,47 persen) dan SMP (23,65 persen) , sehingga banyak lowongan kerja di perusahaan yang tidak bisa dipenuhi oleh pencari kerja . d. ULD (Unit Layanan Disabilitas) Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dalam menempatkan tenaga kerja Penyandang Disabilitas di perusahaan terkendala aturan pemenuhan ***Buyer*** terkait order /pesanan barang yang diproduksi yaitu : syarat bagi penyandang disabilitas bekerja di perusahaan /sector formal harus mempunyai ijasah SD atau penyetaraan / Kejar Paket A melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan kewenangan dari kabupaten /kota . e. Di PKBM tersedia anggaran BOS (Bantu-

		Disabilitas d. Belum adanya pemetaan kebutuhan pelatihan dan kualifikasinya bagi penyandang disabilitas	an Operasional Sekolah) untuk peserta penyetaraan /kejar paket A bagi yang berumur dibawah 24 tahun alias Gratis tidak membayar biaya sekolah. f. Tetapi yang terjadi di masyarakat , banyak pencari kerja umurnya lebih dari 24 tahun dan belum mempunyai ijasah SD dan atau penyetaraan. Kebanyakan mereka termasuk keluarga yang berpotensi miskin. g. Sedangkan ULD Pendidikan belum memfasilitasi pendidikan penyetaraan atau PKBM untuk penyandang disabilitas khususnya untuk yang berumur 24 tahun ke atas h. Kurangnya partisipasi perempuan dalam akses dan pelatihan pada program kegiatan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, khususnya pada sasaran manfaat yaitu bagi perempuan yang mengurus rumah tangga yang termasuk Bukan Angkatan Kerja (BAK) ; i. Kurangnya kontrol dan intervensi kebijakan pada implementasi untuk penetapan sasaran manfaat tersebut yaitu bagi perempuan yang mengurus rumah tangga (yang termasuk Bukan Angkatan Kerja) untuk diberikan akses pelatihan keterampilan, pemberdayaan , supaya dapat meningkatkan kualitas ketrampil- an dan atau pemberdayaan dalam perluasan kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan pendapatan karena dapat bekerja (bekerja sektor

			informal/wirausaha) sehingga meningkat produktivitasnya .
3.	Rendahnya perlindungan pekerja	1) Rendahnya cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal sebesar 11,96 persen dibandingkan sector formal sebesar 68,92 persen. 2) Rendahnya literasi atau pembinaan terkait perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di sektor formal maupun informal .	a. Masih adanya perusahaan yang kurang patuh untuk mendaftarkan pekerjanya untuk ikut Jaminan social ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan. b. Struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah, penduduk yang bekerja di sektor informal masih dominan (59,64 persen) yang sulit di data dan dijangkau oleh BPJS Ketenagakerjaan. c. Regulasi perlindungan pekerja informal masih lemah d. Sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor informal yang rentan dan tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. e. Kapasitas jumlah Pegawai Mediator terbatas (107 orang) di bandingkan jumlah perusahaan yang harus dibina (perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan (104.911 perusahaan) -Kapasitas pengawas ketenagakerjaan yang terbatas (130 orang pegawai) , dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaannya dalam WLKP Online 13.406 perusahaan f. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Pengusaha dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) g. Rendahnya partisipasi Serikat Pekerja (SP) / Serikat Buruh (SB) dalam

			penyusunan Hukum otonom Perjanjian Kerja Bersama (PKB). h. Lemahnya koordinasi pada Kelembagaan Hubungan Industrial untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau perselisihan ketenagakerjaan yang sering terjadi i. Kurangnya dialog antara pekerja dan pengusaha terhadap pemahaman dan literasi perlunya perlindungan dasar pekerja dan cara perhitungannya melalui penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) ,UMK (Upah Minimum Kab/Kota) , Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Mimum Sektoral Kabupaten/Kota j. Rendahnya kesadaran pengusaha untuk membuat Struktur Skala Upah yang adil dan proporsional di perusahaan
4.	Penegakan Norma Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal.	1) Kurangnya fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan yaitu di tahun 2024 dari 13.406 perusahaan di Jawa Tengah yang mempunyai day care sebanyak 53 perusahaan (data WLKP) dan yang mempunyai koperasi pekerja sebanyak 135 perusahaan (berdasarkan data Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans Prov. Jateng 2024) 2) Masih banyaknya perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan, norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan norma lingkungan)	a. Masih kurangnya perlindungan hak normatif pekerja perempuan dan anak di sektor formal maupun informal yang adil dan nondiskriminatif b. Masih tingginya Penduduk Usia Kerja umur 10-17 tahun yang bekerja = 328.986 orang (7,16 %) dari Penduduk Usia Kerja umur 10-17 tahun = 4.589.142 orang dan umumnya anak yang bekerja di sektor informal c. Banyaknya perusahaan yang tidak memahami peraturan ketenagakerjaan d. Banyaknya pengaduan dari masyarakat /

		3) Masih adanya ketimpangan upah yang diterima oleh perempuan 2024 (BPS) : Rata – rata Upah pekerja per bulan : Rp. 2.246.703 Rata- rata upah pekerja Laki –laki : per bulan Rp. 2.446.050 Rata-rata upah pekerja Perempuan per bulan : Rp. 1.891.758 4) Rasio pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak memadai (130 orang) , sehingga kemampuan mengawasi seluruh perusahaan dan yang melaporkan ke WLKP Online 13.406 perusahaan.	pekerja terkait pelayanan ketenagakerjaan : jaminan sosial ketenagakerjaan, upah (upah setara) dan kesejahteraan pekerja , jam kerja , cuti hamil e. Tingginya ego masing – masing para pihak (pengusaha dan pekerja) dalam proses penyelesaian perselisihan, sehingga tidak terjadi kesepakatan sehingga dikeluarkan atau diterbitkan anjuran . f. Masih adanya pengaduan kasus kekerasan verbal, pelecehan seksual , penyebaran video asusila di tempat kerja g. Perusahaan tidak mengetahui dan memahami atau tidak melaksanakan aturan tentang Peraturan Perusahaan (PP_) dan Peraturan Kerja Bersama (PKB) , Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit, Struktur dan Skala Upah dan BPJS Ketenagakerjaan. h. Masih banyaknya perusahaan , khususnya yang skala menengah ke bawah yang belum menerapkan Norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dengan baik. i. Menurunnya Produktivitas tenaga kerja di perusahaaan, akibat dari kondisi lingkungan kerja yang belum memenuhi Standar K3 , seperti kondisi penerangan yang masih kurang, intensitas kebisingan yang tinggi dan banyak peralatan mesin yang tidak menggunakan pengaman dengan baik. j. Masih tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta belum ter-

			laksananya standarisasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja k. Banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan kembali terkait laporan ketenagakerjaan di WLKP Online l. Kurangnya pegawai pengawas KK (Ketenagakerjaan), baik pegawai pengawas KK (Ketenagakerjaan) umum maupun spesialis dibandingkan dengan jumlah perusahaan dan obyek K3
5	Produktivitas dan daya saing tenaga kerja masih rendah .	1) Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah , hal ini karena sebagian besar tenaga kerja berada di sektor padat karya informal (pertanian, perdagangan) , sehingga menyebabkan rendahnya kontribusi PDRB/Kapita 2) Masih banyak pekerja sektor informal seperti industry dan keuangan dengan pendidikan ≤ SMTA 3) Kurangnya ***high – skilled worker*** (pekerja yang berkemampuan tinggi , mempunyai keterampilan,pengetahuan yang memerlukan pendidikan tinggi , pelatihan khusus atau pengalaman yang signifikan) , yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing 4) Kurangnya ketersediaan pekerjaan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja	a. Sebagian besar penduduk yang bekerja berpendidikan SMP kebawah (71,77 %) , yang berkeahlian rendah, menyebabkan produktivitasnya rendah dan daya saing rendah b. Rendahnya jumlah lulusan pendidikan tinggi, menengah yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi sbb : Penduduk yang bekerja (PYB) = 20.861.393 orang menurut pendidikan sebagai berikut : c. Pendidikan tinggi : 1941238 orang ; Pendidikan menengah : 6030413 orang ; Pendidikan dasar : 12.889.742 orang d. **PYB Keahlian Tinggi** =1723511 orang, menurut pendidikan sbb : pendidikan tinggi : 1.033.128 orang ; pendidikan menengah : 439.337 orang ; pendidikan dasar : 401844 orang e. **PYB Keahlian Menengah** : 9709309 orang menurut pendidikan sbb: Pendidikan tinggi : 713917 orang ;

		5) Sektor informal mendominasi , namun tidak produktif secara ekonomi , karena sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal, dengan produktivitas rendah, margin kecil dan akses terbatas ke teknologi dan pelatihan.	Pendidikan menengah : 2723528 orang ; Pendidikan dasar : 6721864 orang f. Masih lemahnya budaya kerja produktif, disiplin waktu, penggunaan teknologi atau kerja berbasis target; dan soft skill (Komunikasi , manajemen waktu , problem solving) g. Masih adanya tenaga kerja yang akhirnya terpaksa menerima pekerjaan walau tidak sesuai dengan keahlian dan kompetensinya dengan konsekueni jabatan yang tidak sesuai dan upah yang lebih rendah mengakibatkan produktivitas tenga kerja lebih rendah dibandingkan kemampuannya . h. Rendahnya produktivitas karena banyaknya jumlah NEET yang mengakibatkan hilangnya kesempatan mereka untuk menghasilkan output yang meningkatkan pendapatan daerah dan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja . i. Minimnya akses pelatihan berbasis produktivitas dan inovasi kerja , sebagian besar pelatihan masih focus pada ketrampilan teknis , belum banyak yang mengembangkan pelatihan efisiensi kerja dan inovasi proses produksi . j. Di Jawa Tengah, belum dibentuk Lembaga Produktivitas Daerah (LPD) sebagai pelaksana di Daerah mendasarkan Inpres 1 Tahun 2023 tentang yang Lembaga Produktivitas Nasional

			k. Mayoritas tenaga kerja terserap di sektor pertanian dan informal tersebut produktivitas rendah l. Jenis jabatan yang menjadi pilihan antar generasi juga memilki perbedaan m. Rendahnya adopsi teknologi dan budaya kerja efisien n. Rendahnya investasi teknologi dan digitalisasi pada sektor padat karya sbb : masih banyak sektor terutama UMKM dan pertanian masih menggunakan metoda kerja tradisional dan peralatan manual ; dan adopsi teknologi digital rendah, padahal dapat meningkatkan produktivitas per tenaga kerja secara signifikan
2	**Transmigrasi**		
	Masih tingginya jumlah penduduk Miskin di Jawa Tengah (Tahun 2023 =10,77 Persen dan tahun 2024 =10,47 Persen)	Rendahnya jumlah penempatan calon transmigran ke daerah tujuan transmigrasi dibandingkan animo calon transmigran	a. Jumlah animo calon transmigran tidak sebanding dengan target/ kuota yang diberikan dari Pusat b. Mulai Tahun 2024 terbentuk nomenklatur baru Kementerian Transmigrasi. c. Rendahnya rata-rata tingkat pendidikan calon transmigran d. d. Adanya penolakan daerah tujuan transmigrasi sebagai daerah tujuan transmigrasi , setelah diterbitkan surat rekomendasi penetapan daerah tujuan transmigrasi dan target calon transmigran oleh Kementerian

			Transmigrasi

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ke depan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis dimaksud juga memperhatikan lingkungan dinamis (isu global, isu nasional dan isu regional) serta implikasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) maupun dan KLHS (Kajian Lingkungan Strategis Lingkungan Hidup) bagi pelayanan daerah. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut dilakukan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044

Berdasarkan telaahan dokumen tersebut, yaitu tema isu pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) maupun KLHS (Kajian Lingkungan Strategis Lingkungan Hidup) yaitu pada Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas dan masih terjadinya kesenjangan ekonomi dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Perumusan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel berikut ini pada halaman sebaliknya.

Tabel 2.10
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi besar yaitu sebagai berikut : Industri Manufaktur yaitu terutama sektor padat karya contoh pada -industri alas kaki dan barang dari kulit , Industri tekstil , Jateng menjadi salah satu pusat produksi tekstil utama di Indonesia (menyumbang 2,474 triliun) ; - Industri mesin dan elektronik nilai investasinya mencapai Rp. 2, 776 triliun menunjukkan potensi besar dalam teknologi dan manufaktur. -Industri makanan dan minuman sektor ini menyumbang sekitar 22,3 % dari total produksi manufaktur di pulau Jawa .	Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi di Provinsi Jawa Tengah	**1. Ancaman Perubahan Iklim dan Transisi Ekonomi** KLHS memetakan bahwa perubahan iklim berdampak pada keberlangsungan sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga. Ini berimplikasi langsung pada hilangnya lapangan kerja tradisional dan mendesak transisi menuju green jobs.	**1.Disrupsi teknologi. Dahsyatnya perkembangan teknologi menggantikan pekerjaan (automasi)** Banyak pekerjaan manual, terutama di sektor manufaktur dan administrasi, digantikan oleh AI/robot. Pengaruh isu ini di Jawa Tengah Pekerja industri padat karya di Jawa Tengah (garmen, tekstil, dll) rentan kehilangan pekerjaan jika tak siap bertransformasi memperburuk pengangguran terbuka.	**1.Bonus demografi nasional.** Indonesia akan memiliki proporsi usia produktif lebih tinggi, dibandingkan dengan usia tidak produktif, hal ini memiliki implikasi positif bila pendudukan usaia produktif tersebut bekerja (betul-betul produktif) dan sebaliknya. Jawa Tengah menghadapi tantangan besar untuk menyerap angkatan kerja baru setiap tahun, melalui penciptaan kesempatan kerja.	**1. Peluang kerja di tingkat regional Asean terbuka,** namun dengan persainan yang sangat keras, sehingga poisi Jawa Tengah belum optimal memanfaatkan kesempatan ini, dan bisa terjadi sebaliknya banyaknunya tenga kerja dari negara-negara Asean ini masuk ke Indonesia tak terkecuali Jawa Tengah.	Rendahnya kualitas SDM tenaga kerja dan ketidaksesuaian kompetensi ;

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
- Industri Logam dan Komponen otomotif : Jawa Tengah memprioritaskan pengembangan industry ini terutama di kawasan industry - Keramik dan furniture kayu : Sektor ini juga menjadi focus pengembangan industry di jawa Tengah . - Peralatan Transportasi : Industri peralatan dan mesin memiliki potensi besar untuk bertumbuh, dengan lebih dari 80 persen kontribusi PDB dari sektor peralatan dan mesin berasal dari Jawa Tengah Dengan potensi ini, Jawa Tengah dapat meningkatkan perekonomiannya daerah dan menyerap lebih banyak tenagakerja melalui investasi di sektor padat karya .	. ***Mismatch*** antara pendidikan dan industri, Kurikulum pendidikan belum terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja.	**2. Kesenjangan Sosial dan Keterbatasan Akses Ekonomi.** KLHS mengidentifikasi bahwa kesenjangan sosial masih tinggi antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Hal ini berdampak pada distribusi akses pekerjaan formal dan produktif. Masih banyak tenaga kerja Jawa Tengah, khususnya di wilayah perdesaan dan pinggiran kota, yang bekerja di sektor informal dan rentan	**2.Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, ancaman terhadap kenekaragaman hayati, munculnya semangan green economy dan green jobs,** Industri global beralih ke energi hijau, mengurangi peran sektor energi fosil & raw material tradisional. Jateng masih bergantung pada sektor pertanian dan energi konvensional, pekerja tidak siap masuk ke green economy dan green job, perlu peningkatan komptensi PVPV (Pendidikan Vokasi dan Pelatihan	**2. Mismatch antara pendidikan dan industri, Kurikulum pendidikan belum terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja**. Lulusan SMA/SMK di Jateng banyak yang menganggur atau bekerja tidak sesuai keahlian hal ini dapat menyebabkan frustasi inefisiensi ekonomi.	**2. Tingginya tuntutan qualifikasi tenaga kerja di ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)**. Jawa Tengah memiliki banyak SMK dan LPK, namun sertifikasi dan akreditasi lembaganya belum kompatibel dengan standar ASEAN**,** sehingga pekerja Jateng sulit bersaing di pasar kerja regional (MEA). Ini juga memperparah **mismatch lulusan** dengan kebutuhan industri lokal	- Terjadinya ***Gap Skill*** (Kesenjangan keterampilan) antara pendidikan dan industry pada pasar kerja .

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
			Vokasi) yang berorientasi green job.			
Potensi komoditas unggulan di Jawa Tengah yaitu kontribusi dari 10 komoditas unggulan di Jawa Tengah yang mendukung Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional yaitu : a.Padi ; b.Jagung, c.Kedelai, d.ubi jalar , e.Ubi Kayu, f.Sorghum , g.Susu, h.daging, i.Ikan lele, j.Nila Salin menjadi potensi untuk diarahkan pada hilirisasi sektor pertanian	Rendahnya Kualitas SDM dan Ketidaksesuaian Kompetensi serta rendahnya kualitas pendidikan vokasi dan keterampilan kerja menjadi penghambat utama daya saing tenaga kerja.	**3. Rendahnya Kualitas SDM dan Ketidaksesuaian Kompetensi**. Rendahnya kualitas pendidikan vokasi dan keterampilan kerja menjadi penghambat utama daya saing tenaga kerja. KLHS menekankan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat tergantung pada perbaikan mutu SDM dan konektivitas dengan kebutuhan sektor riil.	**3. Global talent war (Persaingan tenaga kerja Global)** Persaingan global membuat SDM unggul direkrut lintas negara SDM terbaik di Jawa Tengah bisa pindah ke luar negeri (brain drain), sementara SDM lokal menengah kebawah tetap tertinggal, terjadinya ketimpangan dan job mismatch lokal.	3. **Digitalisasi belum merata.** Pekerjaan digital tumbuh pesat, tapi infrastruktur belum menjangkau semua daerah Wilayah pedesaan terutama yang lebih besar mengalami ketertinggalan akses pelatihan digital, hal ini memperkuat kesenjangan ketenagakerjaan antar wilayah dalam provinsi.	Skill Gap dan disparitas pendapatan akibat adanya lapangan kerja baru, dampak dari digitalisasi pada pasar kerja atau adanya pekerjaan /lapangan kerja baru tumbuh dan kualitas SDM tidak terstandar , meskipun tersedia lapangan kerja	Rendahnya kualitas pendidikan vokasi dan keterampilan kerja menjadi penghambat utama daya saing tenaga kerja.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
			4. Pasar kerja digital dan pola gig economy (pekerjaan jangka pendek kontrak-kontrak sementara) Dunia semakin bergeser ke pekerjaan fleksibel berbasis platform digital. Infrastruktur dan literasi digital di Jawa Tengah masih belum merata, masyarakat desa dan pekerja informal kesulitan beradaptasi hal ini menyebabkan terjadinya stagnasi produktivitas.	**Tujuan 8 TPB/SDGs : Pekerjaan Layak dan pertumbuhan Ekonomi** sebagai berikut : Target 8.1 mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestic bruto per tahun di negara kurang berkembang		
	Penyerapan tenaga kerja masih rendah dan pengangguran usia muda (15 sd 29 tahun) masih tinggi di Provinsi Jawa Tengah masih tinggi		G.20 di Indonesia ; Penciptaan lapangan kerja Berkelanjutan menuju peru-	Target 8.2 : tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi	Tingginya turn over di Jawa Tengah pada sektor pekerjaan industri padat karya	Belum optimalnya pelatihan vokasi yang berbasis industry , dan berbasis kompetensi serta sertifikasinya .

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
			bahan Dunia Kerja	teknologi , termasuk melalui focus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya	dan Skill Missmatch	
			Pasar tenaga kerja Inklusif dan pekerjaan afirmatif untuk penyandang disabilitas			Belum optimal penciptaan kesempatan dan Sistem Informasi Pasar Kerja yang inklusif untuk penyandang disabilitas ;
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan (61,82 persen) dan penyandang disabilitas (20,28 persen) masih rendah di Jawa Tengah .	Minimnya akses terhadap pekerjaan	Pengembangan Kapasitas Manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan	8.5 PadaTahun 2030, mencapai pekerjaaan tetap dan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, bagi semua perempuan dan laki – laki , termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya .	Upah rata – rata pekerja laki laki per bulan dan Upah rata – rata pekerja perempuan per bulan belum setara	Belum terjaminnya keberlanjutan pekerjaan
		Kualitas dan mutu sumber daya manusia yang rendah menyebabkan tingginya angka kemiskinan	G.20 India 2023 Mengatasi Kesenjangan keterampilan Global	8.5.1 Upah rata – rata per jam pekerja Target 2024 Rp 13.300 – Rp 13.600 dan Realisasi 2024 : Rp. 14.760		Rendahnya kualitas tenaga kerja

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Produktivitas dan daya saing tenaga kerja masih rendah .	Minimnya akses terhadap pelatihan untuk mengembangkan kualitas SDM atau mengembangkan kegiatan perekonomian	G.20 Indonesia 2022 Pengembangan Kapasitas Manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan umur : Target 2024 5,44-494 % Realisasi 2024 : 4,78 %	Banyak tenaga kerja di Jateng yang bekerja di sektor informal /UMKM yang berakibat pada tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah.	Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
	Rendahnya cakupan perlindungan jaminan sosial dan pekerja pada sektor informal	Kualitas dan mutu sumber daya manusia yang rendah menyebabkan tingginya angka kemiskinan	G20 India 2023 Pelindungan Tenaga akerja Adaptif di Dunia Kerja yang berubah	8.5.2 Tingkat setengah pengangguran ; Target 2024 : 5,06 % Realisasi 2024 : 7,48 %		Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja
	Penegakan Norma Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal.	Kualitas dan mutu sumber daya manusia yang rendah menyebabkan tingginya angka kemiskinan	G20 India 2023 Pelindungan Tenaga akerja Adaptif di Dunia Kerja yang berubah	Target 8.6 Pada tahun 2030 secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan		Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja
	Masih tingginya jumlah penduduk Miskin di Jawa Tengah.	Kualitas dan mutu sumberdaya manusia yang rendah menyebabkan tingginya angka kemiskinan	Perang Tarif Konlik antar Negara	8.6.1 Persentase Usia Muda (15 – 24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) ; Target 2024 : 26,25 % Realisasi 17,93 %	Penduduk Usia Kerja di Jateng, masih tinggi yang berpendidikan SMP dan SD kebawah	Kualitas dan mutu SDM masih rendah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Penegakan Norma Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal.	**Rendahnya Kualitas SDM dan Ketidaksesuaian Kompetensi**. Rendahnya kualitas pendidikan vokasi dan keterampilan kerja menjadi penghambat utama daya saing tenaga kerja. KLHS menekankan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat tergantung pada perbaikan mutu SDM dan konektivitas dengan kebutuhan sektor riil.	**Pasar kerja digital dan pola gig economy (pekerjaan jangka pendek kontrak-kontrak sementara**) Dunia semakin bergeser ke pekerjaan fleksibel berbasis platform digital. Infrastruktur dan literasi digital di Jawa Tengah masih belum merata, masyarakat desa dan pekerja informal kesulitan beradaptasi hal ini menyebabkan terjadinya stagnasi	Target 8.7. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak –anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya	Dengan kondisi ketenagakerjaan / pasar kerja yang terus berkembang dampak dari digitalisasi, maka dibutuhkan perlindungan bagi tenaga kerja yang kondusif dan berkeadilan dan sesuai dengan norma – norma ketenagakerjaan yang berkembang maupun lingkungan kerja .	Penegakan Norma kerja dan Perlindungan tenaga kerja belum optimal
				8.7.1 (a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok		

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
				umur ; Indikator persentase anak usia 10-17 yang bekerja Target 2024 ; 2,02 % Realisasi 2,42 %		
	Penegakan Norma Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal.		**Pasar kerja digital dan pola gig economy (pekerjaan jangka pendek kontrak-kontrak sementara**) Dunia semakin bergeser ke pekerjaan fleksibel berbasis platform digital. Infrastruktur dan literasi digital di Jawa Tengah masih belum merata, masyarakat desa dan pekerja informal kesulitan beradaptasi hal ini menyebabkan terjadinya	Target.8 .8 Melindungi hak – hak Tenaga keeja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja , termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya 8.8.1 Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma K3 ; Target 2024 : 2.929 perusahaan Realisasi 2024 : 6.748	Dengan kondisi ketenagakerjaan / pasar kerja yang terus berkembang dampak dari digitalisasi, maka dibutuhkan perlindungan bagi tenaga kerja yang kondusif dan berkeadilan dengan norma – norma ketenagakerjaan yang berkembang maupun lingkungan kerja .	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
			stagnasi produktivitas.			

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selama 5(lima) tahun ke depan . Adapun rumusan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : " Meningkatkan Penduduk yang bekerja".

Tujuan 2 : " Meningkatkan Kualitas Tata kelola Perangkat Daerah berintegritas dan Dinamis ".

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 untuk mencapai Tujuan 1 tersebut diatas adalah :

1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja.
2. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
3. Meningkatnya Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Sasaran Jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencapai Tujuan 2 dimaksud diatas adalah yang berkaitan dengan kesekretariatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Selengkapnya relasi rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2025 – 2029 akan tersaji pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun	Target Capaian						Kondisi akhir Kinerja
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Meningkatkan Penduduk Yang Bekerja**		**Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (EPR : Employment to Population Ratio)**	**%**	**70,21**	**69,06**	**69,54**	**70,03**	**70,55**	**71,08**	**71,40**	**71,40**
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	**9.03**	**9,54**	**10,00**	**10,47**	**11,00**	**11,53**	**12,05**	**12,05**
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rp	**55,47**	**56,00**	**56,40**	**56,90**	**57,20**	**57,60**	**58,00**	**58,00**
		Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	%	**73,76**	**74,07**	**74,39**	**74,70**	**75,02**	**75,34**	**75,65**	**75,65**
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	**61,82**	**62,49**	**63,15**	**63,82**	**64,48**	**65,15**	**65,81**	**65,81**

Untuk Tujuan dan Sasaran serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun	Target Capaian						Kondisi akhir Kinerja
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	**Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis**		**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Indeks**	**79,19**	**79,50**	**79,80**	**80,00**	**80,30**	**80,60**	**81,00**	**81,00**
		Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Resiko Indeks (MRI) perangkat daerah	Indeks	**2,955**	**3,00**	**3,01**	**3,02**	**3,03**	**3,04**	**3,05**	**3,05**
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indek Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	**87,50**	**87,55**	**87,60**	**87,65**	**87,70**	**87,75**	**87,80**	**87,80**

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi yang telah disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah menjabarkan dari tujuan dan sasaran Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai dan dijabarkan pula dalam bentuk program-program, kegiatan-kegiatan, sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah atau kewenangan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang disinkronisasikan dengan nomenklatur klasifikasi kodefikasi dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan yang terakhir Kepmendagri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 yaitu tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah.

Arah kebijakan Disnakertans Provinsi Jawa Tengah mengarahkan kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Perangkat daerah atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Arah Kebijakan tersebut membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Arah Kebijakan tersebut untuk mengarahkan pemilihan program, kegiatan, sub kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Arah kebijakan tersebut juga terintegrasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diarahkan pada : 1)Peningkatan akses dan kapasitas perempuan di pasar kerja, memperluas penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas yang responsife gender, memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya termasuk penyediaan informasi pasar kerja yang ramah gender dan inklusif di bidang ketenagakerjaan yaitu adanya Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, serta mendorong kewirausahaan perempuan melalui pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan; 2) Penguatan Data dan Analisis Gender di Bidang Ketenagakerjaan dengan mengembangkan data ketenagakerjaan terpilah menurut jenis kelamin, umur dan disabilitas

dan analisis gender digunakan sebagai dasar merumuskan program dan kegiatan; 3) Perlindungan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan yaitu memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar perusahaan mematuhi aturan terkait perlindungan pekerja perempuan, termasuk hak maternitas, jam kerja, dan upah setara. Mengintegrasikan perpektif gender dalam pemeriksaan dan mediasi hubungan industrial; 4) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Tempat Kerja yaitu Melaksanakan sosialisasi dan edukasi pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender di perusahaan; Menyusun pedoman atau SOP mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses; Memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan untuk mendukung korban; 5) Kolaborasi dan kemitraan yaitu diantaranya : Mengajak asosiasi pengusaha, serikat pekerja, dan LSM untuk terlibat dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah gender , Mendorong dunia usaha menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja.

Perumusan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun harus memperhatikan pohon kinerja dan *cascading* Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, dan selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : **Meningkatkan Penduduk Yang Bekerja**	Sasaran 1.1 :	Strategi 1.1.1	Arah Kebijakan 1.1.1.1
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Penguatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan pelatihan Vokasi untuk sektor tumbuh tinggi , sertifikasi tenaga kerja untuk sektor dengan kebutuhan kompetensi spesifik (contoh : akuntansi, pemasaran digital, pelayanan publik , operator manufaktur dan sebagainya) , link and Match dengan sektor jasa dan industri modern.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan keterampilan pada masyarakat pencari kerja untuk menghasilkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing .
		Strategi 1.1.2	Arah Kebijakan 1.1.2.1
		Penguatan kelembagaan pelatihan dan sumber daya pelatihan di Balai Latihan kerja (BLK) Pemerintah dan Lembaga Pelatihan kerja Swasta (LPKS)	Meningkatkan penguatan kelembagaan pelatihan dan sumber daya pelatihan di Balai Latihan kerja (BLK) Pemerintah dan LPKS , untuk menghasilkan Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi dan mampu menghasilkan luaran atau tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing
	Sasaran 1.2	Strategi 1.2.1	Arah Kebijakan 1.2.1.1
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Penguatan kapasitas tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan adaptasi teknologi serta manajemen usaha mikro guna mendorong produktivitas daya saing serta efisiensi kerja	Melakukan pelatihan peningkatan efisiensi kerja, manajemen usaha mikro , dan adaptasi teknologi sederhana untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Strategi 1.2.2	Arah Kebijakan 1.2.2.2
		Mengoptimalkan potensi unggulan melalui pelatihan berbasis kebutuhan lokal, kolaborasi dengan dunia usahan untuk meningkatkan keterampilan, daya saing dan produktivitas masyarakat di sektor informal dan usaha mikro kecil dan menengah	Meningkatkan penguatan ekosistem kerja produktif di sektor informal dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) dan mendorong kolabororasi dunia usaha untuk peningkatan produktivitas berbasis pelatihan berkelanjutan.
		Strategi 1.2.3	Arah Kebijakan 1.2.2.3
		Pengelolaan iklim kerja yang kondusif , perlindungan jaminan sosial dan penguatan kelembagaan Hubungan Industrial , mendorong perusahaan dalam kepesertaan jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan bagi tenaga kerja .	Meningkatkan dan menjaga pengelolaan iklim kerja yang kondusif, untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja dan meningkatkan kondisi kerja dan produktivitas tenaga kerja serta kesejahteraan mereka.
		Strategi 1.2.4	Arah Kebijakan 1.2.2.4
		Peningkatan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan dan norma Keselamatan dan kesehataan Kerja (Norma K3) serta penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga perusahaan dapat terjaga ketenangan dalam berusaha , yang berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja .	Meningkatkan koordinasi , pengawasan dan pemeriksaan serta pembinaan ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan secara berkesinambungan yang diprioritaskan pada perusahaan yang memiliki penyerapan tenaga kerja besar dan memiliki risiko keselamatan tenaga kerja menengah dan besar .
	Sasaran 1.3 :	Strategi 1.3.1	Arah Kebijakan 1.3.1.1
	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Pembinaan dan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) atau RTK Makro bagi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota/Provinsi dan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro di perusahaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Melakukan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) atau RTK Makro di Provinsi Jawa Tengah dan pembinaan serta pendampingan dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) / RTK Makro dan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro di perusahaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Strategi 1.3.2	Arah Kebijakan 1.3.1.2
		Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri serta perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan kelompok rentan (Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna, Penyandang Disabilitas), penguatan system informasi pasar kerja, dan fasilitasi penciptaan lapangan kerja pada sektor formal maupun non formal .	Melakukan kualitas dan daya saing tenaga kerja agar terserap di pasar kerja dalam dan luar negeri dengan meningkatkan akses dan layanan bursa kerja online (Ayo Kerjo) dan Offline (Job Fair) serta Bursa Kerja Khusus (BKK), penguatan perlindungan dan pendampingan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum, selama dan purna penempatan. Memperluas kesempatan kerja di sektor formal dengan fasilitasi penciptaan lapangan kerja pada sektor potensial (manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif, jasa), dan di sektor informal dengan peningkatan progam wirausaha baru, tenaga kerja mandiri khususnya pada sektor perdagangan, kuliner, pariwisata. Memberdayakan kelompok rentan seperti PMI Purna agar terserap kembali ke pasar kerja, pelatihan dan program kerja layak bagi lansia produktif, peningkatan akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD), penguatan kerjasama multi pihak dengan sektor swasta, pengusaha, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Akademisi dan SMK.
		Strategi 1.3.3	Arah Kebijakan 1.3.1.3
		Peningkatan koordinasi dan integrasi kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota daerah tujuan transmigrasi , dalam pelatihan dan penempatan calon transmigran.	Melakukan sosialisasi, recruitment, pelatihan kepada calon transmigran , dan fasilitasi penempatan calon transmigrankedaerah tujuan transmigrasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2 : **Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis**	Sasaran 2.1 :	Strategi 2.1.1	Arah Kebijakan 2.1.1.1
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Peningkatan kualitas penilaian mandiri terhadap pengelolaan resiko melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berbasis resiko di Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	Melakukan Peningkatan kualitas penilaian mandiri terhadap pengelolaan resiko melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berbasis resiko di Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dengan Rencana Strategis Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
	Sasaran 2.2 :	Strategi 2.2.1	Arah Kebijakan 1.2.1.1
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik , berupa pelayanan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Perangkat Daerah melalui survei kepuasan masyarakat secara mandiri (9 unsur) dan atau menyediakan berbagai pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berbasis elektronik / digital .	Meningkatkan kualitas pelayanan publik , berupa pelayanan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Perangkat Daerah melalui survei kepuasan masyarakat secara mandiri (9 unsur) dan atau menyediakan berbagai pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berbasis elektronik / digital .

Tabel 3.3

Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Pemetaan Kebutuhan tenaga kerja laki -laki dan perempuan termasuk inklusif /kelompok rentan, penguatan kelembagaan dan pengembangan system informasi pasar tenaga Kerja sebagai dasar perencanaan .	Peningkatan Pelatihan berbasis kompetensi , sertifikasi tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan akses layanan penempatan tenaga kerja dan penguatan perlindungan tenaga kerja.	Pengembangan program pelatihan berbasis keutuhan local dan sector unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja baru.	Integrasi Pendidikan Vokasi dengan dunia industry dan dunia usaha , peningkatan adaptasi teknologi dan literasi digital tenaga kerja,penguatan iklim kerja yang kondusif .	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang kompeten dan produktif , perluasan penempatan tenaga kerja berkelanjutan, serta penguatan perlindungan tenaga kerja termasuk kelompok rentan,

Pentahapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang berisi prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah mendasarkan pada strategi dana rah kebijakan yang dirumuskan sebelumnya. Sebagaimana tabel 3.2.1 tersebut diatas, Pentahapan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu tahapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka terwujudnya SDM berdaya saing dan berkarakter untuk sektor ketenagakerjaan sebagai berikut :

Tahap I Tahun 2026 :

Pemetaan Kebutuhan tenaga kerja laki -laki dan perempuan termasuk inklusif /kelompok rentan, penguatan kelembagaan dan pengembangan system informasi pasar tenaga Kerja sebagai dasar perencanaan pada umumnya dan khususnya pada Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Tahap II Tahun 2027 :

Peningkatan Pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan akses layanan penempatan tenaga kerja dan penguatan perlindungan tenaga kerja.

Tahap III Tahap 2028 :
Pengembangan program pelatihan berbasis keutuhan local dan sector unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja baru.
Tahap IV Tahap 2029 :
Integrasi Pendidikan Vokasi dengan dunia industry dan dunia usaha , peningkatan adaptasi teknologi dan literasi digital tenaga kerja,penguatan iklim kerja yang kondusif .
Tahap V Tahap 2030 :
Peningkatan jumlah tenaga kerja yang kompeten dan produktif , perluasan penempatan tenaga kerja berkelanjutan, serta penguatan perlindungan tenaga kerja termasuk kelompok rentan.

Penahapan dan fokus tema Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar dalam pentahapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dan fokus tema Pembangunan Daerah sebagai berikut :
Tahap I Tahun 2026 : Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional
Tahap II Tahun 2027 : Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan Ekonomi
Tahap III Tahap 2028 : Peningkatan dan pemeratan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau
Tahap IV Tahap 2029 : Menumbuhkan Daya saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan
Tahap V Tahap 2030 : Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan

3.3 Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dan termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen resiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	12	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja yang inklusif	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran	Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan, Pembekalan, dan Pengembangan Aplikasi Ayo Kerjo	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan	Melakukan pembinaan dan pendampingan pada pegwai di Kab/Kota/Prov dalam menyusun Dokumen RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				- Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing			

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di	Melakukan Reviu terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing			
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi	Melakukan Evaluasi dan Monitoring terkait penyusunan RTK Makro / RTK Mikro pada Dinas di Kab/Kota/Prov dan perusahaan di Jateng	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				penyusunan Renstra dan Renja SKPD	ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing			

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di	Melakukan Bimtek penyusunan RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di perusahaan bagi Pegawai Kab/Kota/Provinsi dan perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing			
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Memaksimalkan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan, Berkolaborasi dengan stake holder pengusaha, pekerja serikat pekerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Sosialisasi, pelatihan/bimtek peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas baik untuk pencari kerja, tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha baru di masyarakat serta pengusaha / pengelola perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Perusahaan membuat SOP tentang bidang pekerjaan untuk tenaga kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	12	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"	Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	12	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"	Sosialisasi Rekrutmen magang ke Jepang tidak dikenakan biaya	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	- Pengelolaan aset diberikan kepada Pihak lain sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku Menyusun aturan/kebijakan serta Berita Acara dalam pengelolaan aset berkolaborasi dengan BPKAD Prov. Jateng, Biro APBJ Setda Prov. Jateng, Biro Hukum Setda Prov. Jateng sesuai dengan prosedur yang berlaku	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	Menegur yang bersangkutan di kegiatan tersebut untuk mengajukan nota dinas sebelum menggunakan aset	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	12	Seseorang sebagai peminat lelang/penjualan aset mempunyai keinginan untuk memenangkan lelang tersebut tanpa prosedur yang benar	Proses lelang/penjualan aset tanpa prosedur sehingga tidak sesuai dengan aturan dan Pengurus barang menjadi ketakutan karena diintimidasi sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja	Melaporkan secara lisan kepada Inspektorat Prov. Jateng	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	12	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)	Mengkoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi ketenagakerjaan dan BPS , Bappeda serta Diskomfo Jateng terkait data dan informasi ketenagakerjaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	12	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)	Menyusun SK Satu Data ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang harus ditanda tangani oleh Gubernur (Tahun 2025 sampai saat ini belum ditanda tangani Gub) yang anggotanya dari Bidang dan UPTD Disnakertrans serta SDM Kab/Kota Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Pada rencana strategis tahun 2025 – 2029 ini disusun rencana program dan kegiatan,sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah mendasarkan hasil pohon kerja dan cascading yang telah disusun. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan mencakup program pokok :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ;

Untuk mendukung program pokok tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar akan dilaksanakan program penunjang yaitu :

Alur tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, Strategi, Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 selengkapnya tersaji pada Tabel sebagaimana tersaji pada halaman sebalik berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan Penduduk Yang Bekerja *												14.633.510.000		14.887.713.000		15.190.475.000		19.051.987.000		35.247.316.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR) *	%	70,21	69,06	69,54		70,03		70,55		71,08		71,4		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja **											2.038.494.000		2.104.393.000		2.156.734.000		2.333.149.000		2.555.472.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja **	%	73,76	74,07	74,39	1.791.754.000	74,7	1.857.653.000	75,02	1.909.994.000	75,34	2.076.539.000	75,65	2.273.199.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA ***									1.645.081.000		1.710.571.000		1.762.502.000		1.884.347.000		2.061.787.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal ***	%	40,36	42	44,05	876.290.000	46,1	929.360.000	48,15	967.862.000	50,2	1.050.878.000	52,25	1.155.969.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04.1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****								508.215.000		509.995.000		547.028.000		568.911.000		625.804.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya penganggur diberikan pelayanan	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi	%	60	75	75	508.215.000	75	509.995.000	75	547.028.000	75	568.911.000	75	625.804.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	perantaraan kerja ****														Dalam Negeri	
		2.07.04.1.01.0001			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja *****							89.426.000		89.739.000		90.054.000		93.657.000		103.023.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya *****	Orang	100	120	50	89.426.000	50	89.739.000	50	90.054.000	50	93.657.000	50	103.023.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.01.0002			Pelayanan Antar Kerja *****							372.144.000		373.447.000		410.000.000		426.400.000		469.040.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Transmigrasi	
						Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD *****	Orang	1000	1150	1500	372.144.000	1650	373.447.000	1815	410.000.000	1997	426.400.000	2196	469.040.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja *****							18.724.000		18.790.000		18.856.000		19.611.000		21.573.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan	Orang	100	350	100	18.724.000	100	18.790.000	100	18.856.000	100	19.611.000	100	21.573.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penemp

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Jabatan *****															atan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.01.0004			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) *****							27.921.000		28.019.000		28.118.000		29.243.000		32.168.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL *****	Orang	50	50	50	27.921.000	55	28.019.000	61	28.118.000	67	29.243.000	73	32.168.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.04.1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ****								4.955.000		4.973.000		4.991.000		5.191.000		5.711.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya ijin LPTKS yang diterbitkan	Persentase ijin LPTKS yang diterbitkan ****	%	N/A	60	60	4.955.000	60	4.973.000	60	4.991.000	60	5.191.000	60	5.711.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.02.0001			Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi *****	Lembaga	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.02.0002			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS *****							4.955.000		4.973.000		4.991.000		5.191.000		3.711.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku *****	Lembaga	N/A	N/A	2	4.955.000	2	4.973.000	2	4.991.000	2	5.191.000	2	3.711.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.04.1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja ****								350.080.000		401.306.000		402.711.000		463.118.000		509.430.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	Presentase pelaporan Informasi Pasar Kerja Kabupaten/ Kota yang meliputi data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja ****	%	19,37	83,33	83,33	350.080.000	95,24	401.306.000	95,24	402.711.000	95,24	463.118.000	95,24	509.430.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.03.0002			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmig	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					rasi	
						Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) *****	Orang	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1000	2.000.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.03.0003			Job Fair/Bursa Kerja *****							350.080.000		401.306.000		402.711.000		463.118.000		507.430.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa	Orang	N/A	N/A	200	350.080.000	200	401.306.000	200	402.711.000	220	463.118.000	220	507.430.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penemp

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Kerja *****															atan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****								13.040.000		13.086.000		13.132.000		13.658.000		15.024.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan	Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna	%	100	100	100	13.040.000	100	13.086.000	100	13.132.000	100	13.658.000	100	15.024.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	TKA (Tenaga Kerja Asing) ****															
		2.07.04.1.05.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							13.040.000		13.086.000		13.132.000		13.658.000		15.024.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pendataan TKA	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA *****	Orang	15	N/A	15	13.040.000	15	13.086.000	15	13.132.000	15	13.658.000	15	15.024.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						dan Transmigrasi
						Meningkatnya tenaga kerja baru di sektor informal	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal ***	%	68,1	68,3	68,5	596.003.000	68,77	598.091.000	69,03	600.187.000	69,39	624.197.000	70,01	686.618.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04.1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****								426.603.000		428.097.000		429.596.000		446.780.000		491.458.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	%	51,85	47,5	47,68	426.603.000	48	428.097.000	48,1	429.596.000	48,3	446.780.000	48,5	491.458.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						informal .	****															
		2.07.04.1.01.0005			Perluasan Kesempatan Kerja *****							426.603.000		428.097.000		429.596.000		446.780.000		491.458.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja *****	Orang	230	230	200	426.603.000	200	428.097.000	200	429.596.000	220	446.780.000	220	491.458.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi								169.400.000		169.994.000		170.591.000		177.417.000		195.160.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				****																	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI Purna diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI Purna diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal ****	%	75	50	51,25	144.801.000	51,25	145.308.000	52	145.818.000	53	151.652.000	53,33	166.818.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.04.0001			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) *****							28.277.000		28.376.000		28.476.000		29.616.000		32.578.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya *****	Orang	65	60	50	28.277.000	50	28.376.000	50	28.476.000	50	29.616.000	50	32.578.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.04.1.04.0004			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan *****							116.524.000		116.932.000		117.342.000		122.036.000		134.240.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan *****	Orang	80	80	60	116.524.000	60	116.932.000	60	117.342.000	60	122.036.000	60	134.240.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan ****	%	2,83	1,51	1,68	24.599.000	1,75	24.686.000	1,83	24.773.000	1,91	25.765.000	2	28.342.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.04.0002			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik *****							20.079.000		20.150.000		20.221.000		21.030.000		23.133.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi dan pemberian Izin kepada cabang Perusahaan PMI secara Online	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online *****	Perusahaan	N/A	N/A	15	20.079.000	15	20.150.000	15	20.221.000	15	21.030.000	15	23.133.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						grasi
		2.07.04.1.04.0003			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran *****							4.520.000		4.536.000		4.552.000		4.735.000		5.209.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA *****	Orang	9	2	2	4.520.000	2	4.536.000	2	4.552.000	2	4.735.000	2	5.209.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Meningkatnya penyandang disabilitas yang bekerja di sektor	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal ***	%	14,24	20	21,75	78.000.000	23,5	88.000.000	25,25	99.000.000	27	110.000.000	28,75	110.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						formal															an Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04.1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****								78.000.000		88.000.000		99.000.000		110.000.000		110.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya penyandang disabilitas yang ditempatkan	Persentase penyandang disabilitas yang ditempatkan ****	%	46,67	53,33	58,82	78.000.000	60	88.000.000	65	99.000.000	68,18	110.000.000	70,83	110.000.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.01.0006			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan *****							78.000.000		88.000.000		99.000.000		110.000.000		110.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD *****	Orang	4520	47250	49300	78.000.000	51350	88.000.000	53400	99.000.000	55450	110.000.000	55450	110.000.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Meningkatnya pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi ***	%	61,6	66,89	67,71	94.788.000	68,52	95.120.000	69,34	95.453.000	70,15	99.272.000	70,47	109.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04.1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja ****								94.788.000		95.120.000		95.453.000		99.272.000		109.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi ****	%	36,91	37,77	38,63	94.788.000	39,5	95.120.000	40,36	95.453.000	41,22	99.272.000	42,07	109.200.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.03.0001			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online *****							94.788.000		95.120.000		95.453.000		99.272.000		109.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online *****	Dokumen	N/A	N/A	1	94.788.000	1	95.120.000	1	95.453.000	1	99.272.000	1	109.200.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI ***									116.673.000		117.082.000		117.492.000		122.192.000		134.412.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi ***	%	4,44	1,04	2,06	116.673.000	5,11	117.082.000	7,14	117.492.000	8,08	122.192.000	10,02	134.412.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3.32.03.1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****								116.673.000		117.082.000		117.492.000		122.192.000		134.412.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi ****	%	10	10,2	10,31	116.673.000	10,42	117.082.000	10,53	117.492.000	10,64	122.192.000	10,71	134.412.000	Pokja Transmigrasi	
		3.32.03.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****							116.673.000		117.082.000		117.492.000		122.192.000		134.412.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam	Laporan	5	1	1	116.673.000	1	117.082.000	1	117.492.000	1	122.192.000	1	134.412.000	Pokja Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Daerah Provinsi	1 (Satu) Daerah Provinsi *****															
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI ***									30.000.000		30.000.000		30.000.000		70.000.000		77.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Meningkatnya pelatihan transmigrasi terhadap penempatan transmigrasi	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian ***	%	4,44	1,2	1,2	30.000.000	1,28	30.000.000	1,37	30.000.000	1,5	70.000.000	1,6	77.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
		3.32.03.1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari								30.000.000		30.000.000		30.000.000		70.000.000		77.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****																	Kerja Pertanian Klampok	
						Meningkatnya calon transmigran yang diberikan pelatihan	Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan ****	%	N/A	80	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	70.000.000	100	77.000.000	Pokja Pelatihan	
		3.32.03.1.01.0006			Pelatihan Transmigrasi *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		70.000.000		77.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan *****	Orang	16	10	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	16	70.000.000	16	77.000.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan **	%	61,82	62,49	63,15	246.740.000	63,82	246.740.000	64,48	246.740.000	65,15	256.610.000	65,81	282.273.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA ***									246.740.000		246.740.000		246.740.000		256.610.000		282.273.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya Kabupaten/ Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/ Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah ***	%	62,85	68,57	85,71	246.740.000	91,42	246.740.000	94,28	246.740.000	97,14	256.610.000	100	282.273.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02.1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) ****								246.740.000		246.740.000		246.740.000		256.610.000		282.273.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja ****	%	75	80	84	246.740.000	88	246.740.000	92	246.740.000	96	256.610.000	100	282.273.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0001			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro *****							80.850.000		80.850.000		80.850.000		84.084.000		92.493.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro *****	Dokumen	N/A	N/A	1	80.850.000	1	80.850.000	1	80.850.000	1	84.084.000	1	92.493.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.02.1.01.0003			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro *****							77.370.000		77.370.000		77.370.000		80.465.000		88.512.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/ Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro *****	Orang	N/A	N/A	35	77.370.000	35	77.370.000	35	77.370.000	35	80.465.000	35	88.512.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.02.1.01.0004			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro *****							88.520.000		88.520.000		88.520.000		92.061.000		101.268.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/ Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK	Orang	N/A	N/A	35	88.520.000	35	88.520.000	35	88.520.000	35	92.061.000	35	101.268.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Mikro *****															
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja **											5.650.562.000		5.442.343.000		5.629.897.000		6.683.810.000		10.349.205.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja **	Juta Rupiah	55,47	56	56,4	5.650.562.000	56,9	5.442.343.000	57,2	5.629.897.000	57,6	6.683.810.000	58	10.349.205.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ***									747.043.000		749.648.000		749.648.000		894.312.000		983.744.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
						Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas ***	%	62,2	64	68	747.043.000	70	749.648.000	71,85	749.648.000	72,26	894.312.000	73,64	983.744.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Kerja	
		2.07.03.1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah ****								704.040.000		706.645.000		706.645.000		841.309.000		925.440.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
						Meningkatnya lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas ****	%	21	20,67	21,5	704.040.000	21,95	706.645.000	22,93	706.645.000	23,41	841.309.000	23,81	925.440.000	Pokja Produktivitas	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah *****							704.040.000		706.645.000		706.645.000		841.309.000		925.440.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas *****	Perusahaan	N/A	330	275	704.040.000	275	706.645.000	275	706.645.000	300	841.309.000	320	925.440.000	Pokja Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2.07.03.1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi ****								43.003.000		43.003.000		43.003.000		53.003.000		58.304.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
						Meningkatnya pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan ****	%	4	2	2	43.003.000	2	43.003.000	2	43.003.000	2	53.003.000	2	58.304.000	Pokja Produktivitas	
		2.07.03.1.04.0001			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja *****							43.003.000		43.003.000		43.003.000		53.003.000		58.304.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Produktivitas Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	43.003.000	1	43.003.000	1	43.003.000	1	53.003.000	1	58.304.000	Pokja Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ***									1.778.391.000		1.457.285.000		1.634.170.000		2.161.562.000		4.374.726.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Meningkatnya tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan	%	70	72	73	1.778.391.000	74	1.457.285.000	75	1.634.170.000	76	2.161.562.000	76	4.374.726.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Produktivitas ***															
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ****								1.768.451.000		1.447.345.000		1.624.230.000		2.131.622.000		4.344.786.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Meningkatnya peningkatan sarana pelatihan kerja	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja ****	%	N/A	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	70.000.000	100	2.077.000.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		70.000.000		2.077.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan	Unit	N/A	N/A	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	2	70.000.000	50	2.077.000.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							kerja *****															Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
						Meningkatnya pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas / kewirausahaan	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas / kewirausahaan ****	%	71	67,08	72,99	1.605.530.000	73,88	1.284.424.000	74,33	1.461.309.000	75,55	1.923.701.000	76,36	2.116.072.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi *****							1.605.530.000		1.284.424.000		1.461.309.000		1.923.701.000		2.116.072.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun *****	Orang	1225	839	790	1.605.530.000	630	1.284.424.000	720	1.461.309.000	940	1.923.701.000	1040	2.116.072.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
						Meningkatnya jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/ kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/ kesepakatan dan kerjasama dengan BLK ****	%	18,75	23,53	27,78	137.921.000	31,58	137.921.000	35	137.921.000	38,1	137.921.000	40,91	151.714.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja *****							137.921.000		137.921.000		137.921.000		137.921.000		151.714.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n *****	Lembaga	N/A	1	3	137.921.000	4	137.921.000	4	137.921.000	4	137.921.000	5	151.714.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		2.07.03.1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah ****								9.940.000		9.940.000		9.940.000		29.940.000		29.940.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Meningkatnya pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan	%	N/A	8,06	5	9.940.000	5	9.940.000	5	9.940.000	5	29.940.000	5	29.940.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						produktivitas atau kewirausahaan	produktivitas atau kewirausahaan ****															
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah *****							9.940.000		9.940.000		9.940.000		29.940.000		29.940.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas *****	Perusahaan	N/A	5	5	9.940.000	5	9.940.000	5	9.940.000	6	29.940.000	6	29.940.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ***									1.191.461.000		1.294.973.000		1.298.848.000		1.372.306.000		1.509.540.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Jaminan Sosial	
						Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ***	%	38,59	47,56	51,03	173.250.000	53,64	173.858.000	56,38	174.468.000	59,26	181.448.000	62,4	199.593.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota ****								173.250.000		173.858.000		174.468.000		181.448.000		199.593.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Meningkatnya perusahaan yang telah	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP	%	92,34	93,04	93,75	173.250.000	94,46	173.858.000	95,16	174.468.000	95,86	181.448.000	96,57	199.593.000	Pokja Syarat Kerja Dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						memiliki PP dan PKB	dan PKB ****														Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.01.0001			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial *****							62.931.000		63.152.000		63.374.000		65.909.000		72.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online *****	Perusahaan	105	105	58	62.931.000	60	63.152.000	60	63.374.000	62	65.909.000	65	72.500.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		2.07.05.1.01.0002			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial *****							14.158.000		14.208.000		14.258.000		14.829.000		16.312.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online *****	Perusahaan	105	105	57	14.158.000	57	14.208.000	57	14.258.000	57	14.829.000	60	16.312.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		2.07.05.1.01.0003			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja *****							96.161.000		96.498.000		96.836.000		100.710.000		110.781.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	70	140	70	96.161.000	70	96.498.000	70	96.836.000	70	100.710.000	70	110.781.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	*****															
						Meningkatnya LKS Bipartit yang terbentuk	Persentase LKS Bipartit yang terbentuk ***	%	49,75	49,77	49,8	496.868.000	51,13	498.608.000	5,59	500.355.000	52,06	520.371.000	52,53	572.409.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepenting								496.868.000		498.608.000		500.355.000		520.371.000		572.409.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				an di 1 (satu) Daerah Provinsi ****																		
						Meningkatnya Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk ****	%	49,72	50,19	50,66	353.175.000	51,13	354.412.000	51,59	355.654.000	52,06	369.881.000	52,53	406.870.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
		2.07.05.1.02.0003			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat							142.133.000		142.631.000		143.131.000		148.857.000		163.743.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi *****																	
						Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi *****	Asosiasi dan Serikat Pekerja	1000	1000	1000	142.133.000	1000	142.631.000	1000	143.131.000	1000	148.857.000	1000	163.743.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		2.07.05.1.02.0004			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi *****							211.042.000		211.781.000		212.523.000		221.024.000		243.127.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina *****	Lembaga	1	36	36	211.042.000	40	211.781.000	44	212.523.000	48	221.024.000	53	243.127.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
						Meningkatnya perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi ****	%	85	85,68	86,85	143.693.000	88,02	144.196.000	89,19	144.701.000	90,37	150.490.000	91,54	165.539.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
		2.07.05.1.02.0005			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi *****							143.693.000		144.196.000		144.701.000		150.490.000		165.539.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi *****	Perusahaan	75	100	39	143.693.000	39	144.196.000	40	144.701.000	50	150.490.000	60	165.539.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
						Meningkatnya perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah ***	%	8,35	43,13	43,26	332.139.000	43,39	433.303.000	43,52	434.821.000	43,65	462.362.000	43,77	508.600.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah								332.139.000		433.303.000		434.821.000		462.362.000		508.600.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ****																		
						Meningkatnya pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota ****	%	1,76	1,17	1,41	332.139.000	1,64	433.303.000	1,88	434.821.000	2,11	462.362.000	2,34	508.600.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
		2.07.05.1.03.0001			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) *****							221.210.000		221.985.000		222.762.000		223.542.000		245.897.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP *****	Surat Keputusan	1	1	1	221.210.000	1	221.985.000	1	222.762.000	1	223.542.000	1	245.897.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jamina

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						n Sosial
		2.07.05.1.03.0003			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) *****							45.577.000		45.737.000		45.898.000		47.734.000		52.508.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK *****	Surat Keputusan	1	1	1	45.577.000	1	45.737.000	1	45.898.000	1	47.734.000	1	52.508.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		2.07.05.1.03.0005			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja							65.352.000		165.581.000		166.161.000		191.086.000		210.195.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					*****																Sosial	
						Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan *****	Orang	75	100	100	65.352.000	260	165.581.000	271	166.161.000	283	191.086.000	296	210.195.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
						Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial ***	%	96,15	96,69	96,75	189.204.000	96,79	189.204.000	96,84	189.204.000	96,88	208.125.000	96,91	228.938.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi ****								189.204.000		189.204.000		189.204.000		208.125.000		228.938.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Meningkatnya Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ****	%	96	96,67	96,77	47.272.000	96,83	47.272.000	96,88	47.272.000	96,92	51.999.000	96,97	57.199.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.05.1.02.0002			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi *****							47.272.000		47.272.000		47.272.000		51.999.000		57.199.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
						Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan *****	Perkara	N/A	N/A	125	47.272.000	138	47.272.000	151	47.272.000	166	51.999.000	183	57.199.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan ****	%	96,15	96,69	96,74	141.932.000	96,77	141.932.000	96,81	141.932.000	96,84	156.126.000	96,88	171.739.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
		2.07.05.1.02.0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi *****								141.932.000		141.932.000		141.932.000		156.126.000		171.739.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah *****	%	N/A	30	196	141.932.000	196	141.932.000	196	141.932.000	197	156.126.000	200	171.739.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN ***									1.469.705.000		1.474.851.000		1.480.015.000		1.596.625.000		1.756.289.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	
						Menurunnya pelanggaran norma ketenagakerjaan	Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan ***	%	81,53	80,96	80,8	1.469.705.000	80,67	1.474.851.000	80,53	1.480.015.000	80,27	1.596.625.000	80	1.756.289.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan ****								1.469.705.000		1.474.851.000		1.480.015.000		1.596.625.000		1.756.289.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	
						Meningkatnya perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja ****	%	29,41	33,56	37,87	355.180.000	43,03	356.424.000	49,91	357.672.000	56,8	375.556.000	63,68	413.112.000	Pokja Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan *****							355.180.000		356.424.000		357.672.000		375.556.000		413.112.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	
						Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 *****	Perusahaan	90	195	195	355.180.000	195	356.424.000	195	357.672.000	197	375.556.000	200	413.112.000	Pokja Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						n
						Meningkatnya penanganan kasus ketenagakerjaan	Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan ****	%	55,17	55,2	55,21	268.305.000	55,27	269.245.000	55,34	270.188.000	55,37	283.698.000	55,46	312.068.000	Pokja Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	
		2.07.06.1.01.0002			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan *****							268.305.000		269.245.000		270.188.000		283.698.000		312.068.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	
						Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan *****	Kasus	140	260	92	268.305.000	95	269.245.000	95	270.188.000	95	283.698.000	100	312.068.000	Pokja Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
						Meningkatnya perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan ****	%	62,08	62,61	62,92	846.220.000	63,26	849.182.000	63,71	852.155.000	64	937.371.000	64,27	1.031.109.000	Pokja Norma Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.06.1.01.0001			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan *****							846.220.000		849.182.000		852.155.000		937.371.000		1.031.109.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	
						Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) *****	Perusahaan	925	1190	1119	846.220.000	1119	849.182.000	1119	852.155.000	1120	937.371.000	1130	1.031.109.000	Pokja Norma Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN ***									463.962.000		465.586.000		467.216.000		659.005.000		1.724.906.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Meningkatnya perusahaan memiliki kategori baik dalam	Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan	%	26,41	26,67	27,06	463.962.000	27,49	465.586.000	27,91	467.216.000	28,32	659.005.000	28,74	1.724.906.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						penerapan K3	K3 ***														Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
		2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan ****								463.962.000		465.586.000		467.216.000		659.005.000		1.724.906.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Meningkatnya kegiatan penerapan K3 di perusahaan yang dilakukan oleh Balai K2 (semula Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan)	Persentase kegiatan penerapan K3 di perusahaan yang dilakukan oleh Balai K3 (semula Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan) ****	%	60,16	61,67	62,86	463.962.000	63,13	465.586.000	63,41	467.216.000	63,64	659.005.000	63,83	1.724.906.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan *****							463.962.000		465.586.000		467.216.000		659.005.000		1.724.906.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 *****	Perusahaan	90	60	60	463.962.000	60	465.586.000	60	467.216.000	65	659.005.000	65	1.724.906.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja **											6.944.454.000		7.340.977.000		7.403.844.000		10.035.028.000		22.342.639.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten **	%	9,03	9,54	10	6.944.454.000	10,47	7.340.977.000	11	7.403.844.000	11,53	10.035.028.000	12,05	22.342.639.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ***									532.851.000		534.717.000		536.591.000		940.251.000		1.034.278.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Kerja	
						Meningkatnya pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ***	%	8,36	8,39	9,28	424.346.000	9,34	425.832.000	9,66	427.324.000	10	770.057.000	10,67	847.064.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ****								424.346.000		425.832.000		427.324.000		770.057.000		847.064.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
						Meningkatnya penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri ****	%	30,77	27,62	33,33	424.346.000	35,14	425.832.000	37,84	427.324.000	40,54	770.057.000	44,44	847.064.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi *****							362.486.000		363.755.000		365.029.000		651.532.000		716.686.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun *****	Orang	137	N/A	74	362.486.000	74	363.755.000	74	365.029.000	133	651.532.000	140	716.686.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan							61.860.000		62.077.000		62.295.000		118.525.000		128.378.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja *****																	
						Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n *****	Lembaga	6	N/A	3	61.860.000	3	62.077.000	3	62.295.000	6	118.525.000	8	128.378.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2.07.03.1.01.0004			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas *****																	
						Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n *****	Kesepakatan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
						Meningkatnya lembaga pelatihan yang terakreditasi	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi ***	%	14	14,09	14,29	108.505.000	15,56	108.885.000	16	109.267.000	17,31	170.194.000	17,78	187.214.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Tenaga Kerja	
		2.07.03.1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja ****								108.505.000		108.885.000		109.267.000		170.194.000		187.214.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
						Meningkatnya LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga ****	%	29,09	30	31,82	108.505.000	36,36	108.885.000	37,5	109.267.000	40	170.194.000	41,67	187.214.000	Pokja Standarisasi dan Sertifikasi	
		2.07.03.1.02.0001			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja *****							108.505.000		108.885.000		109.267.000		170.194.000		187.214.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksanaya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi *****	LPK	20	N/A	15	108.505.000	15	108.885.000	15	109.267.000	25	170.194.000	30	187.214.000	Pokja Standarisasi dan Sertifikasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ***									1.559.283.000		1.942.796.000		2.717.155.000		3.615.306.000		7.451.729.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri ***	%	70	75,13	83,68	1.559.283.000	83,87	1.942.796.000	84,05	2.717.155.000	84,21	3.615.306.000	84,36	7.451.729.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ****								1.559.283.000		1.942.796.000		2.717.155.000		3.615.306.000		7.451.729.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Meningkatnya penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri ****	%	12,61	49,33	83,68	1.513.621.000	83,87	1.897.134.000	84,05	2.671.493.000	84,21	3.504.644.000	84,36	5.330.000.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi *****							1.513.621.000		1.897.134.000		2.671.493.000		3.504.644.000		5.330.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun *****	Orang	1060	264	264	1.513.621.000	330	1.897.134.000	466	2.671.493.000	610	3.504.644.000	930	5.330.000.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Berdasarkan Klaster Kompetensi																Industri Kelas A
						Meningkatnya peningkatan sarana pelatihan kerja	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja ****	%	100	12,5	77,78	25.000.000	70	25.000.000	63,64	25.000.000	58,33	70.000.000	53,85	2.077.000.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		70.000.000		2.077.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja *****	Unit	476	N/A	7	25.000.000	8	25.000.000	9	25.000.000	10	70.000.000	50	2.077.000.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
						Meningkatnya jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/ kesepakata	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/ kesepakata	%	3	5	9,09	20.662.000	12,5	20.662.000	15,38	20.662.000	17,86	40.662.000	20	44.729.000	Pokja Pemasaran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						n dan kerjasama dengan BLK	n dan kerjasama dengan BLK ****															
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja *****							20.662.000		20.662.000		20.662.000		40.662.000		44.729.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada	Lembaga	N/A	N/A	2	20.662.000	2	20.662.000	3	20.662.000	3	40.662.000	4	44.729.000	Pokja Pemasaran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Lembaga Pelatihan Kerja	Tahun n *****															
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ***									2.667.870.000		1.659.060.000		1.905.103.000		2.511.980.000		7.851.245.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian ***	%	9	9,6	10	2.667.870.000	10,67	1.659.060.000	11,2	1.905.103.000	12,27	2.511.980.000	12,67	7.851.245.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster								2.667.870.000		1.659.060.000		1.905.103.000		2.511.980.000		7.851.245.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Kompetensi ****																	Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Meningkatnya penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian ****	%	54	54	55,6	2.639.025.000	57,2	1.630.215.000	58,6	1.876.258.000	60,2	2.463.135.000	61,7	5.797.515.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi *****							2.639.025.000		1.630.215.000		1.876.258.000		2.463.135.000		5.797.515.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun *****	Orang	1372	628	650	2.639.025.000	400	1.630.215.000	462	1.876.258.000	600	2.463.135.000	1426	5.797.515.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya peningkatan sarana pelatihan kerja	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja ****	%	100	74,75	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	2.027.500.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		2.027.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja *****	Unit	638	75	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	5	25.000.000	50	2.027.500.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
						Meningkatnya jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/ kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/ kesepakatan dan kerjasama dengan BLK ****	%	N/A	80	100	3.845.000	100	3.845.000	100	3.845.000	100	23.845.000	100	26.230.000	Pokja Pemasaran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja *****							3.845.000		3.845.000		3.845.000		23.845.000		26.230.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n *****	Lembaga	N/A	3	3	3.845.000	3	3.845.000	3	3.845.000	4	23.845.000	4	26.230.000	Pokja Pemasaran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ***									2.184.450.000		3.204.404.000		2.244.995.000		2.967.491.000		6.005.387.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata ***	%	21	22,4	23,38	2.184.450.000	23,7	3.204.404.000	24	2.244.995.000	24,28	2.967.491.000	25,38	6.005.387.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ****								2.184.450.000		3.204.404.000		2.244.995.000		2.967.491.000		6.005.387.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan ****	%	146,32	22,67	23,38	2.154.241.000	23,7	3.141.362.000	24	2.181.953.000	24,28	2.860.539.000	24,28	3.887.739.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi *****							2.154.241.000		3.141.362.000		2.181.953.000		2.860.539.000		3.887.739.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun *****	Orang	556	288	290	2.154.241.000	420	3.141.362.000	290	2.181.953.000	390	2.860.539.000	520	3.887.739.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kelas A
						Meningkatnya peningkatan sarana pelatihan kerja	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja ****	%	100	100	100	25.000.000	100	57.833.000	100	57.833.000	100	81.743.000	100	2.089.918.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja *****							25.000.000		57.833.000		57.833.000		81.743.000		2.089.918.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja *****	Unit	551	12	3	25.000.000	3	57.833.000	4	57.833.000	5	81.743.000	50	2.089.918.000	Pokja Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/ kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/ kesepakatan dan kerjasama dengan BLK ****	%	12,5	40	40	5.209.000	41,67	5.209.000	41,67	5.209.000	42,86	25.209.000	42,86	27.730.000	Pokja Pemasaran	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja *****							5.209.000		5.209.000		5.209.000		25.209.000		27.730.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana	Lembaga	N/A	4	4	5.209.000	4	5.209.000	5	5.209.000	5	25.209.000	6	27.730.000	Pokja Pemasaran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwis

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n *****															ata Kelas A
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi *												91.947.853.000		92.759.464.000		93.533.174.000		94.758.898.000		139.308.405.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi *	Angka	79,19	79,5	79,8		80		80,3		80,6		81		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di											703.260.000		703.260.000		703.260.000		731.392.000		804.532.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **																					
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **	Angka	2,955	3	3,01	703.260.000	3,02	703.260.000	3,03	703.260.000	3,04	731.392.000	3,05	804.532.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									703.260.000		703.260.000		703.260.000		731.392.000		804.532.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ***	%	100	100	100	703.260.000	100	703.260.000	100	703.260.000	100	731.392.000	100	804.532.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								703.260.000		703.260.000		703.260.000		731.392.000		804.532.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	N/A	N/A	81	703.260.000	82	703.260.000	83	703.260.000	84	731.392.000	85	804.532.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							459.605.000		459.605.000		459.605.000		477.990.000		525.789.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	7	7	7	459.605.000	7	459.605.000	7	459.605.000	7	477.990.000	7	525.789.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							142.655.000		142.655.000		142.655.000		152.402.000		177.743.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	N/A	N/A	5	142.655.000	5	142.655.000	6	142.655.000	6	152.402.000	7	177.743.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							72.000.000		72.000.000		72.000.000		72.000.000		72.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	17	72.000.000	18	72.000.000	19	72.000.000	20	72.000.000	21	72.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							29.000.000		29.000.000		29.000.000		29.000.000		29.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **											91.244.593.000		92.056.204.000		92.829.914.000		94.027.506.000		138.503.873.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **	Angka	87,5	87,55	87,6	91.244.593.000	87,65	92.056.204.000	87,7	92.829.914.000	87,75	94.027.506.000	87,8	138.503.873.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									85.277.641.000		85.736.914.000		86.341.375.000		87.046.107.000		95.327.426.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ***	%	100	100	100	85.277.641.000	100	85.736.914.000	100	86.341.375.000	100	87.046.107.000	100	95.327.426.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								76.257.467.000		76.267.467.000		76.337.467.000		76.373.877.000		77.089.964.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	12	76.257.467.000	12	76.267.467.000	12	76.337.467.000	12	76.373.877.000	12	77.089.964.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							75.347.243.000		75.357.243.000		75.427.243.000		75.427.243.000		76.046.666.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	420	420	420	75.347.243.000	441	75.357.243.000	450	75.427.243.000	460	75.427.243.000	470	76.046.666.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							644.516.000		644.516.000		644.516.000		670.297.000		737.327.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	644.516.000	12	644.516.000	12	644.516.000	12	670.297.000	12	737.327.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD *****							194.266.000		194.266.000		194.266.000		202.037.000		222.241.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	12	12	12	194.266.000	12	194.266.000	12	194.266.000	12	202.037.000	12	222.241.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****							71.442.000		71.442.000		71.442.000		74.300.000		81.730.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	1	1	1	71.442.000	1	71.442.000	1	71.442.000	1	74.300.000	1	81.730.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								50.000.000		50.000.000		50.000.000		52.000.000		63.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.000.000	1	63.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		52.000.000		57.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	11	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	52.000.000	2	57.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						pada SKPD	pada SKPD *****															
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ****								44.220.000		44.220.000		44.220.000		45.989.000		51.588.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Meningkatnya pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ****	Laporan	1	1	1	44.220.000	1	44.220.000	1	44.220.000	1	45.989.000	1	51.588.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.04.0002			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****							44.220.000		44.220.000		44.220.000		45.989.000		50.588.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	12	1	12	44.220.000	12	44.220.000	12	44.220.000	12	45.989.000	12	50.588.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian								102.220.000		102.220.000		102.220.000		106.309.000		118.941.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmig	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Perangkat Daerah ****																	rasi	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	102.220.000	100	102.220.000	100	102.220.000	100	106.309.000	100	118.941.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****							36.300.000		36.300.000		36.300.000		37.752.000		41.528.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	1	1	1	36.300.000	1	36.300.000	1	36.300.000	1	37.752.000	1	41.528.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.400.000		11.440.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Orang	10	4	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.400.000	1	11.440.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Fungsi	dan Pelatihan *****															
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****							22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.880.000		25.168.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	100	100	20	22.000.000	22	22.000.000	24	22.000.000	26	22.880.000	29	25.168.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****							33.920.000		33.920.000		33.920.000		35.277.000		38.805.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	50	20	33.920.000	22	33.920.000	24	33.920.000	26	35.277.000	29	38.805.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.801.909.000		2.856.909.000		2.917.409.000		3.054.073.000		3.360.483.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmig	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				****																	rasi	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	2.801.909.000	100	2.856.909.000	100	2.917.409.000	100	3.054.073.000	100	3.360.483.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		52.000.000		57.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	52.000.000	12	57.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							135.780.000		135.780.000		135.780.000		141.212.000		155.334.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	135.780.000	1	135.780.000	1	135.780.000	1	141.212.000	1	155.334.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		104.000.000		114.400.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	104.000.000	1	114.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							180.000.000		180.000.000		180.000.000		187.200.000		205.920.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	187.200.000	1	205.920.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							73.240.000		73.240.000		73.240.000		76.170.000		83.787.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	N/A	1	73.240.000	1	73.240.000	1	73.240.000	1	76.170.000	1	83.787.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.200.000		5.720.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.200.000	1	5.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							41.562.000		41.562.000		41.562.000		43.225.000		47.548.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	41.562.000	12	41.562.000	12	41.562.000	12	43.225.000	12	47.548.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							1.666.327.000		1.666.327.000		1.666.327.000		1.732.981.000		1.906.280.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	1.666.327.000	12	1.666.327.000	12	1.666.327.000	12	1.732.981.000	12	1.906.280.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	3	6	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							550.000.000		605.000.000		665.500.000		712.085.000		783.294.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	12	12	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	712.085.000	12	783.294.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								236.713.000		236.713.000		236.713.000		246.182.000		2.754.801.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	29	30	236.713.000	31	236.713.000	32	236.713.000	33	246.182.000	34	2.754.801.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							0		0		0		0		0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar *****							0		0		0		0		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	171	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							206.713.000		206.713.000		206.713.000		214.982.000		236.481.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	3	15	10	206.713.000	10	206.713.000	10	206.713.000	10	214.982.000	10	236.481.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		31.200.000		34.320.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	31.200.000	1	34.320.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.028.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2.028.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							yang Disediakan *****															
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								4.663.510.000		5.012.915.000		5.315.552.000		5.776.370.000		6.354.009.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	40	40	40	4.663.510.000	40	5.012.915.000	40	5.315.552.000	40	5.776.370.000	40	6.354.009.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							13.941.000		21.765.000		21.765.000		22.636.000		24.900.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksanannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	12	12	13.941.000	12	21.765.000	12	21.765.000	12	22.636.000	12	24.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber							1.183.350.000		1.183.350.000		1.183.350.000		1.230.684.000		1.353.753.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmig	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Daya Air dan Listrik *****																rasi	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	1.183.350.000	12	1.183.350.000	12	1.183.350.000	12	1.230.684.000	12	1.353.753.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							166.219.000		177.800.000		177.800.000		184.912.000		203.404.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	6	166.219.000	7	177.800.000	7	177.800.000	8	184.912.000	9	203.404.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							3.300.000.000		3.630.000.000		3.932.637.000		4.338.138.000		4.771.952.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	3.300.000.000	12	3.630.000.000	12	3.932.637.000	12	4.338.138.000	12	4.771.952.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.121.602.000		1.166.470.000		1.337.794.000		1.391.307.000		5.534.440.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	70	75	1.121.602.000	80	1.166.470.000	85	1.337.794.000	90	1.391.307.000	95	5.534.440.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan							0		0		0		0		0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****																	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							368.107.000		382.832.000		440.000.000		457.600.000		503.360.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	N/A	20	20	368.107.000	20	382.832.000	20	440.000.000	20	457.600.000	20	503.360.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****															
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						n dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****														WAIAN	grasi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							26.902.000		27.979.000		42.000.000		43.680.000		48.048.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	10	50	20	26.902.000	20	27.979.000	20	42.000.000	20	43.680.000	20	48.048.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							93.463.000		97.202.000		122.600.000		127.504.000		140.255.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	5	25	25	93.463.000	27	97.202.000	30	122.600.000	33	127.504.000	36	140.255.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							85.600.000		89.024.000		85.600.000		89.024.000		97.927.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	3	3	4	85.600.000	5	89.024.000	5	85.600.000	5	89.024.000	5	97.927.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							405.229.000		421.439.000		488.804.000		508.357.000		4.557.193.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	5	5	5	405.229.000	5	421.439.000	5	488.804.000	5	508.357.000	10	4.557.193.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							75.251.000		78.262.000		91.740.000		95.410.000		104.951.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	3	N/A	6	75.251.000	6	78.262.000	6	91.740.000	6	95.410.000	6	104.951.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						67.050.000		69.732.000		67.050.000		69.732.000		76.706.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	67.050.000	1	69.732.000	1	67.050.000	1	69.732.000	1	76.706.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									1.702.178.000		1.788.720.000		1.815.120.000		1.944.847.000		12.139.337.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			DAERAH PROVINSI ***																		Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri ***	%	100	100	100	1.702.178.000	100	1.788.720.000	100	1.815.120.000	100	1.944.847.000	100	12.139.337.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								54.000.000		54.000.000		54.000.000		56.160.000		61.776.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	12	54.000.000	12	54.000.000	12	54.000.000	12	56.160.000	12	61.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							54.000.000		54.000.000		54.000.000		56.160.000		60.776.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	54.000.000	12	54.000.000	12	54.000.000	12	56.160.000	12	60.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						n Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****																Kelas A
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								195.380.000		195.380.000		195.380.000		203.197.000		227.519.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	195.380.000	100	195.380.000	100	195.380.000	100	203.197.000	100	227.519.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							27.188.000		27.188.000		27.188.000		28.276.000		31.104.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	27.188.000	1	27.188.000	1	27.188.000	1	28.276.000	1	31.104.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							990.000		990.000		990.000		1.030.000		1.133.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	990.000	1	990.000	1	990.000	1	1.030.000	1	1.133.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							10.273.000		10.273.000		10.273.000		10.684.000		11.753.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Kelas A	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	6	1	10.273.000	1	10.273.000	1	10.273.000	1	10.684.000	1	11.753.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							42.281.000		42.281.000		42.281.000		43.973.000		48.371.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	2	1	42.281.000	1	42.281.000	1	42.281.000	1	43.973.000	1	48.371.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.144.000		1.259.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.144.000	1	1.259.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kelas A
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							113.548.000		113.548.000		113.548.000		118.090.000		129.899.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	12	12	12	113.548.000	12	113.548.000	12	113.548.000	12	118.090.000	12	129.899.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD *****															grasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								86.875.000		86.875.000		86.875.000		90.350.000		4.557.385.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	2	2	86.875.000	2	86.875.000	2	86.875.000	2	90.350.000	2	4.557.385.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar *****							0		0		0		0		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Kelas A	
						Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kelas A
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		3.998.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	3.998.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Lainnya yang Disediakan *****															grasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							86.875.000		86.875.000		86.875.000		90.350.000		99.385.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	3	2	86.875.000	2	86.875.000	2	86.875.000	2	90.350.000	2	99.385.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.131.348.000		1.217.890.000		1.244.290.000		1.351.180.000		1.486.299.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	27	27	1.131.348.000	27	1.217.890.000	27	1.244.290.000	27	1.351.180.000	27	1.486.299.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.920.000		1.920.000		1.920.000		1.997.000		2.197.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Industri Kelas A	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	3	1	3	1.920.000	3	1.920.000	3	1.920.000	3	1.997.000	3	2.197.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							264.000.000		264.000.000		290.400.000		302.016.000		332.218.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	264.000.000	12	264.000.000	12	290.400.000	12	302.016.000	12	332.218.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							865.428.000		951.970.000		951.970.000		1.047.167.000		1.151.884.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	865.428.000	12	951.970.000	12	951.970.000	12	1.047.167.000	12	1.151.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								234.575.000		234.575.000		234.575.000		243.960.000		5.804.358.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	Unit	N/A	15	15	234.575.000	15	234.575.000	15	234.575.000	15	243.960.000	15	5.804.358.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						an daerah	dilakukan pemeliharaan ****															
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								44.226.000		44.226.000		44.226.000		45.996.000		50.596.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	4	1	4	44.226.000	4	44.226.000	4	44.226.000	4	45.996.000	4	50.596.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan							0		0		0		0		10.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Alat Besar *****																Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		20.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							69.904.000		69.904.000		69.904.000		72.701.000		79.972.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	66	3	69.904.000	3	69.904.000	3	69.904.000	3	72.701.000	3	79.972.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kelas A
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							53.750.000		53.750.000		53.750.000		55.900.000		61.490.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	5	2	53.750.000	2	53.750.000	2	53.750.000	2	55.900.000	2	61.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							*****															grasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		5.500.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	10	5.500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	40	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						66.695.000		66.695.000		66.695.000		69.363.000		76.300.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	5	66.695.000	5	66.695.000	5	66.695.000	5	69.363.000	5	76.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									1.536.513.000		1.625.041.000		1.639.944.000		1.763.976.000		10.937.263.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			DAERAH PROVINSI ***																		Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok ***	%	100	100	100	1.536.513.000	100	1.625.041.000	100	1.639.944.000	100	1.763.976.000	100	10.937.263.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								53.286.000		53.286.000		53.286.000		55.418.000		61.960.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	12	53.286.000	12	53.286.000	12	53.286.000	12	55.418.000	12	61.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							53.286.000		53.286.000		53.286.000		55.418.000		59.960.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	53.286.000	12	53.286.000	12	53.286.000	12	55.418.000	12	59.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								49.865.000		49.865.000		49.865.000		51.860.000		59.049.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	49.865.000	100	49.865.000	100	49.865.000	100	51.860.000	100	59.049.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							3.601.000		3.601.000		3.601.000		3.742.000		4.117.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.601.000	1	3.601.000	1	3.601.000	1	3.742.000	1	4.117.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							5.330.000		5.330.000		5.330.000		5.544.000		6.099.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	5.330.000	1	5.330.000	1	5.330.000	1	5.544.000	1	6.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							*****															Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.162.000		3.162.000		3.162.000		3.289.000		3.618.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.162.000	1	3.162.000	1	3.162.000	1	3.289.000	1	3.618.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							4.012.000		4.012.000		4.012.000		4.173.000		4.591.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	4.012.000	1	4.012.000	1	4.012.000	1	4.173.000	1	4.591.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan							158.000		158.000		158.000		165.000		182.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Perundang-Undangan *****																Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	1	1	158.000	1	158.000	1	158.000	1	165.000	1	182.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							4.153.000		4.153.000		4.153.000		4.320.000		4.752.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	1	4.153.000	1	4.153.000	1	4.153.000	1	4.320.000	1	4.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							29.449.000		29.449.000		29.449.000		30.627.000		33.690.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	29.449.000	12	29.449.000	12	29.449.000	12	30.627.000	12	33.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.800.000		4.018.880.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	N/A	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.800.000	1	4.018.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						memiliki nilai aset	yang disediakan ****															
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar *****							0		0		0		0		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		3.536.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	3.536.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.800.000		22.880.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.800.000	1	22.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.037.390.000		1.125.918.000		1.140.821.000		1.244.885.000		1.366.258.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	36	36	36	1.037.390.000	36	1.125.918.000	36	1.140.821.000	36	1.244.885.000	36	1.366.258.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.077.000		3.077.000		3.077.000		3.201.000		3.522.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	12	3.077.000	12	3.077.000	12	3.077.000	12	3.201.000	12	3.522.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertani

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						an Klampok
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							149.030.000		149.030.000		163.933.000		170.491.000		184.423.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	149.030.000	12	149.030.000	12	163.933.000	12	170.491.000	12	184.423.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							885.283.000		973.811.000		973.811.000		1.071.193.000		1.178.313.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	885.283.000	12	973.811.000	12	973.811.000	12	1.071.193.000	12	1.178.313.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								375.972.000		375.972.000		375.972.000		391.013.000		5.430.116.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	N/A	40	375.972.000	45	375.972.000	50	375.972.000	55	391.013.000	60	5.430.116.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							39.751.000		39.751.000		39.751.000		41.342.000		45.477.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	6	3	39.751.000	7	39.751.000	7	39.751.000	8	41.342.000	8	45.477.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							12.810.000		12.810.000		12.810.000		13.323.000		14.656.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	8	1	12.810.000	1	12.810.000	1	12.810.000	1	13.323.000	1	14.656.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							70.000.000		70.000.000		70.000.000		72.800.000		80.080.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	3	72.800.000	3	80.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							230.000.000		230.000.000		230.000.000		239.200.000		5.257.120.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	2	1	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	3	239.200.000	10	5.257.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****																Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							23.411.000		23.411.000		23.411.000		24.348.000		26.783.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	1	2	23.411.000	2	23.411.000	2	23.411.000	3	24.348.000	3	26.783.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****															Kerja Pertanian Klampok
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									853.598.000		907.446.000		987.799.000		1.066.411.000		6.173.059.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas ***	%	100	100	100	853.598.000	100	907.446.000	100	987.799.000	100	1.066.411.000	100	6.173.059.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								34.800.000		34.800.000		34.800.000		36.192.000		39.812.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktiv	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					itas Kelas A	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	12	34.800.000	12	34.800.000	12	34.800.000	12	36.192.000	12	39.812.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							34.800.000		34.800.000		34.800.000		36.192.000		39.812.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	34.800.000	12	34.800.000	12	34.800.000	12	36.192.000	12	39.812.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD *****							0		0		0		0		0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								33.740.000		33.740.000		33.740.000		35.093.000		41.606.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Produktivitas Kelas A	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	33.740.000	100	33.740.000	100	33.740.000	100	35.093.000	100	41.606.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							4.589.000		4.589.000		4.589.000		4.773.000		5.251.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.589.000	1	4.589.000	1	4.589.000	1	4.773.000	1	5.251.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.103.000		3.103.000		3.103.000		3.228.000		3.551.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	12	12	3.103.000	12	3.103.000	12	3.103.000	12	3.228.000	12	3.551.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							*****															Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							3.927.000		3.927.000		3.927.000		4.085.000		4.494.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	1	1	3.927.000	1	3.927.000	1	3.927.000	1	4.085.000	1	4.494.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							1.924.000		1.924.000		1.924.000		2.001.000		2.202.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	12	1	1	1.924.000	1	1.924.000	1	1.924.000	1	2.001.000	1	2.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							1.637.000		1.637.000		1.637.000		1.703.000		1.874.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	1	1	1.637.000	1	1.637.000	1	1.637.000	1	1.703.000	1	1.874.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							18.560.000		18.560.000		18.560.000		19.303.000		21.234.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	12	12	12	18.560.000	12	18.560.000	12	18.560.000	12	19.303.000	12	21.234.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						SKPD	SKPD *****															Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		2.362.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	N/A	13	0	14	0	15	0	16	0	17	2.362.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							*****															Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	2.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	50	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan *****															Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								750.640.000		804.488.000		884.841.000		959.330.000		1.055.264.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	36	36	36	750.640.000	36	804.488.000	36	884.841.000	36	959.330.000	36	1.055.264.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							960.000		960.000		960.000		999.000		1.099.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	1	1	960.000	1	960.000	1	960.000	1	999.000	1	1.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							211.200.000		211.200.000		232.320.000		241.614.000		265.775.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	211.200.000	12	211.200.000	12	232.320.000	12	241.614.000	12	265.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							538.480.000		592.328.000		651.561.000		716.717.000		788.390.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	538.480.000	12	592.328.000	12	651.561.000	12	716.717.000	12	788.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								34.418.000		34.418.000		34.418.000		35.796.000		2.672.377.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Unit	N/A	N/A	40	34.418.000	45	34.418.000	50	34.418.000	55	35.796.000	60	2.672.377.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						urusan pemerintahan daerah	an daerah yang dilakukan pemeliharaan ****															
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								21.835.000		21.835.000		21.835.000		22.709.000		24.980.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	3	3	3	21.835.000	3	21.835.000	4	21.835.000	4	22.709.000	5	24.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengemb	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****																angan Produktivitas Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kelas A
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.021.000		10.021.000		10.021.000		10.422.000		11.465.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	11	3	10.021.000	3	10.021.000	3	10.021.000	4	10.422.000	4	11.465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							2.562.000		2.562.000		2.562.000		2.665.000		2.932.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	7	3	2.562.000	3	2.562.000	3	2.562.000	4	2.665.000	4	2.932.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.623.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	4	2.623.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									920.130.000		961.990.000		982.280.000		1.059.310.000		3.665.244.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) ***	%	100	100	100	920.130.000	100	961.990.000	100	982.280.000	100	1.059.310.000	100	3.665.244.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								43.060.000		43.060.000		43.060.000		44.783.000		49.262.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	12	43.060.000	12	43.060.000	12	43.060.000	12	44.783.000	12	49.262.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							42.100.000		42.100.000		42.100.000		43.784.000		48.163.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	12	12	42.100.000	12	42.100.000	12	42.100.000	12	43.784.000	12	48.163.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							960.000		960.000		960.000		999.000		1.099.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	12	12	12	960.000	12	960.000	12	960.000	12	999.000	12	1.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.720.000		20.592.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.720.000	1	20.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.720.000		20.592.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.720.000	1	20.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								61.254.000		61.254.000		61.254.000		63.706.000		73.078.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	61.254.000	100	61.254.000	100	61.254.000	100	63.706.000	100	73.078.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							8.350.000		8.350.000		8.350.000		8.684.000		9.553.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	1	1	8.350.000	1	8.350.000	1	8.350.000	1	8.684.000	1	9.553.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							3.266.000		3.266.000		3.266.000		3.397.000		3.737.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	1	1	3.266.000	1	3.266.000	1	3.266.000	1	3.397.000	1	3.737.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.400.000		11.440.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.400.000	1	11.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							6.246.000		6.246.000		6.246.000		6.496.000		7.146.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.246.000	1	6.246.000	1	6.246.000	1	6.496.000	1	7.146.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.585.000		2.585.000		2.585.000		2.689.000		2.958.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.585.000	1	2.585.000	1	2.585.000	1	2.689.000	1	2.958.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							30.807.000		30.807.000		30.807.000		32.040.000		35.244.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	30.807.000	12	30.807.000	12	30.807.000	12	32.040.000	12	35.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		2.386.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	N/A	18	0	19	0	20	0	21	0	22	2.386.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar *****							0		0		0		0		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	6	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		1.924.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	7	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	5	1.924.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	4	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								629.362.000		671.222.000		691.512.000		746.801.000		821.482.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	36	36	36	629.362.000	36	671.222.000	36	691.512.000	36	746.801.000	36	821.482.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							7.862.000		7.862.000		7.862.000		8.177.000		8.995.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	12	7.862.000	12	7.862.000	12	7.862.000	12	8.177.000	12	8.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Kesela

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						matan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							202.900.000		202.900.000		223.190.000		232.118.000		255.330.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	202.900.000	12	202.900.000	12	223.190.000	12	232.118.000	12	255.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							418.600.000		460.460.000		460.460.000		506.506.000		557.157.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	418.600.000	12	460.460.000	12	460.460.000	12	506.506.000	12	557.157.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								168.454.000		168.454.000		168.454.000		185.300.000		314.830.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan	Unit	N/A	N/A	50	168.454.000	55	168.454.000	60	168.454.000	65	185.300.000	70	314.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							pemeliharaan ****															
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							96.654.000		96.654.000		96.654.000		106.320.000		116.952.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	3	N/A	N/A	96.654.000	N/A	96.654.000	N/A	96.654.000	N/A	106.320.000	N/A	116.952.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihara							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					an dan Perizinan Alat Besar *****																Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Kesela

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Angkutan Darat Tak Bermotor	Perizinannya *****															matan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.100.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					(Balai K3)	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Bangunan Lainnya	Direhabilitasi *****															dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							61.800.000		61.800.000		61.800.000		67.980.000		74.778.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	1	61.800.000	1	61.800.000	1	61.800.000	1	67.980.000	1	74.778.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									954.533.000		1.036.093.000		1.063.396.000		1.146.855.000		10.261.544.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			PROVINSI ***																		Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata ***	%	100	100	100	954.533.000	100	1.036.093.000	100	1.063.396.000	100	1.146.855.000	100	10.261.544.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								45.000.000		45.000.000		45.000.000		46.800.000		51.480.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	46.800.000	12	51.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							45.000.000		45.000.000		45.000.000		46.800.000		50.480.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	1	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	46.800.000	1	50.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD *****							0		0		0		0		1.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								14.907.000		33.467.000		33.467.000		34.808.000		48.291.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Persentase layanan administrasi umum perangkat	%	100	100	100	14.907.000	100	33.467.000	100	33.467.000	100	34.808.000	100	48.291.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						perangkat daerah	daerah yang sesuai standar layanan ****															
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							1.601.000		1.601.000		1.601.000		1.666.000		1.833.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	12	1.601.000	12	1.601.000	12	1.601.000	12	1.666.000	12	1.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							13.306.000		13.306.000		13.306.000		13.839.000		15.224.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	13.306.000	1	13.306.000	1	13.306.000	1	13.839.000	1	15.224.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						n	Penggandaan yang Disediakan *****															grasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							0		18.560.000		18.560.000		19.303.000		21.234.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	12	18.560.000	12	18.560.000	12	19.303.000	12	21.234.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		0		0		0		4.462.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	20	22	0	24	0	26	0	28	0	30	4.462.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar *****							0		0		0		0		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						grasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		4.000.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	3	4.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								893.026.000		956.026.000		983.329.000		1.063.583.000		1.169.942.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	36	36	36	893.026.000	36	956.026.000	36	983.329.000	36	1.063.583.000	36	1.169.942.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							0		1.000.000		1.000.000		1.040.000		1.144.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.040.000	1	1.144.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							273.026.000		273.026.000		300.329.000		312.343.000		343.578.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	1	12	273.026.000	12	273.026.000	12	300.329.000	12	312.343.000	12	343.578.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							620.000.000		682.000.000		682.000.000		750.200.000		825.220.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					a Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	620.000.000	12	682.000.000	12	682.000.000	12	750.200.000	12	825.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.664.000		4.527.831.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemelihara	Unit	N/A	8	9	1.600.000	10	1.600.000	11	1.600.000	12	1.664.000	13	4.527.831.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							an ****															
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.664.000		1.831.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	8	1	1.600.000	1	1.600.000	1	1.600.000	1	1.664.000	1	1.831.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Perizinan Alat Besar *****																Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Bermotor																dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		4.510.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	4	4.510.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****															grasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		2.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Tabel 4.1.2

Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Penyusunan/pembaruan Kurikulum Pelatihan yang Sesuai Pasar Kerja	4 Dokumen Tahun : 2025 Target - Dok 2026 Target 4 Dok 2027 Target - Dok 2028 Target - Dok 2029 Target 4 Dok	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ; Kegiatan Pelaksanaan Latihan kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ; Sub kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1) Balai Latihan Kerja Industri 2) Balai Latihan Kerja Pertanian 3) Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata 4) Balai Pengembangan Produktivitas	Dinas Kabupaten/Kota /Provinsi dan Pusat ; Pasar Kerja dan atau Perusahaan / DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan) ; dan Akademisi
		Bursa Kerja atau Job Fair	1 Kegiatan Tahun : 2025 Target 200 org 2026 Target 200 org 2027 Target 200 org 2028 Target 200 org 2029 Target 200 org	Program Penempatan Tenaga Kerja; Kegiatan pengelolaan Informasi pasar kerja ; Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa kerja	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Kabupaten/Kota /Provinsi dan Pusat ; Lintas Sektor bersama Perangkat Daerah ; Pasar Kerja atau DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan) ; dan Akademisi

		Pelatihan yang Sesuai Pasar Kerja	10.271 orang Tahun : 2025Target 2019 org 2026Target 1994 org 2027Target 1780 org 2028Target 1938 org 2029Target 2540 org	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Kegiatan Pelaksanaan Latihan kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ; Sub kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1) Balai Latihan Kerja Industri 2) Balai Latihan Kerja Pertanian 3) Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata 4) Balai Pengembangan Produktivitas	Dinas Kabupaten/Kota /Provinsi dan Pusat ; Pasar Kerja dan atau Perusahaan / DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan) ; dan Akademisi.
2	Day care untuk buruh di Kawasan Industri	Penyusunan Pergub tentang Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Bagi Pekerja	1 Dokumen Tahun : 2025 Target 1 Dok 2026 Target 1 Dok 2027 Target - Dok 2028 Target - Dok 2029 Target - Dok	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; Kegiatan Penetapan Upah Minimum Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ; Perusahaan / Kawasan Industri ; Dinas di Kabupaten/ Kota/Provinsi dan Pusat .

				Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
		Koordinasi dengan pengusaha dan pengelola kawasan industri/ perusahaan	1 Kegiatan Target 2025Target 4 perush 2026Target 4 perush 2027Target 4 perush 2028Target 4 perush 2029Target 4 perush	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kegiatan Penetapan Upah Minimum Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Pengelola/Perusahaan di Kawasan Industri

				Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
3	Perlindungan Hak Buruh melalui Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang Payur Hukum Ketenaga-kerjaan	-Jaminan cuti hamil, melahirkan bagi pekerja perempuan dan laki –laki -Perlindungan atas hubungan Industrial -Jaminan keterlibatan kaum buruh dalam penetapan upah	Telah dinaungi dalam Perda Jateng No. 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Fokus pengawasan dan penyelesaian kasus) Tahun Perush 2025 Target 475 2026 Target 778 2027 Target 525 2028 Target 550 2029 Target 575	Program Pengawasan Ketenagakerjaan ; Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan ; Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas di Kab/Kota dan Pusat ; DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah ; Perusahaan ; Dinas Kesehatan ; BPJS Ketenagakerjaan

			Tahun Kasus 2025 Target 260 2026 Target 260 2027 Target 250 2028 Target 240 2029 Target 230	Program Pengawasan Ketenagakerjaan ; Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan ; Sub Kegiatan Penegakan hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas di Kab/Kota dan Pusat ; DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah ; Perusahaan ; Dinas Kesehatan ; BPJS Ketenagakerjaan
			Tahun Kasus 2025 Target 125 2026 Target 125 2027 Target 138 2028 Target 151 2029 Target 166	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi ; Sub Kegiatan ; Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja	Bidang Hubungan Industrial	Dinas di Kab/Kota dan Pusat ; DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah ; Perusahaan ; BPJS Ketenagakerjaan; Pengadilan Hubungan Industrial

				dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi		
4	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Aplikasi Ayo Kerjo untuk Pencari Kerja	Tahun orang 2025 Target 50 2026 Target 50 2027 Target 55 2028 Target 61 2029 Target 67	Program Penempatan Tenaga Kerja; Kegiatan Pengelolaan Informasi pasar kerja ; Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Antar Lokal)	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Kepemudaan , Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ; Dinas Komunikasi dan Digitalisasi Provinsi Jawa Tengah ;
			Tahun orang 2025 Target 350 2026 Target 100 2027 Target 100 2028 Target 100 2029 Target 100	Program Penempatan Tenaga Kerja; Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota Informasi pasar kerja ; Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas di Kabupaten/Kota /Provinsi dan Pusat ; Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan (DUDI)

	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Aplikasi Ayo Kerjo untuk Pencari Kerja	Pemeliharaan Asset Tak Berwujud (diantaranya untuk pemeliharaan Aplikasi Ayo Kerjo) Tahun Aplikasi 2025 Target 1 2026 Target 1 2027 Target 1 2028 Target 1 2029 Target 1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ; Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah; Sub Kegiatan : Pemeliharaan Asset Tak Berwujud.	Sekretariat	Dinas Komunikasi dan Digitalisasi Provinsi Jawa Tengah

Dalam sub bab ini juga menjelaskan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung 136 Program Daerah sebagaimana telah tercantum dalam tabel 4.1.2 tersebut diatas yang di laksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu 4 (empat) Balai Latihan Kerja di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
2. Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A
3. Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
4. Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Tabel 4.2.1
Indikator Kinerja Utama Renstra
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indikator Kinerja Tujuan 1									
I	**Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (EPR : Employment to Population Ratio)**	**68,04**	**70,21**	**69,06**	**69,54**	**70,03**	**70,55**	**71,08**	**71,40**	
	Indikator Kinerja Sasaran									
1	Persentase tenaga kerja yang kompeten	8,26	9.03	9,54	10,00	10,47	11,00	11,53	12,05	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	55,16	55,47	56,00	56,40	56,90	57,20	57,60	58,00	
3	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (%)	71,18	73,76	74,07	74,39	74,70	75,02	75,34	75,65	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58,92	61,82	62,49	63,15	63,82	64,48	65,15	65,81	
	Indikator Kinerja Tujuan 2									
II.	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**NA**	**79,19**	**79,50**	**79,80**	**80,00**	**80,30**	**80,60**	**81,00**	
	Indikator Kinerja Sasaran									
1	Indeks Manajemen Resiko Indeks (MRI) perangkat daerah	NA	2,955	3,00	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	
2	Indek Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	84,09	87,50	87,55	87,60	87,65	87,70	87,75	87,80	

Kinerja Perangkat Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel 4.2.1 tersebut diatas adalah merupakan indikator tujuan dan atau sasaran yang dirumuskan sebagai berikut yaitu : a. Indikator Tujuan 1 dan 3 Indikator Kinerja Sasaran 1

b. Indikator Tujuan 2

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, juga ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah urusan Wajib yang tidak berkaitan Pelayanan Dasar : Urusan Tenaga Kerja sebagaimana tabel 4.2.2 disebalik halaman ini .

Tabel 4.2.2
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2024	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja									
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	65,71	68,57	68,57	85,71	91,43	94,29	97,14	100,00	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	8,26	9,03	9,54	9,98	10,47	10,98	11,53	12,05	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp)	55,16	55,47	56,00	56,36	56,86	57,23	57,60	58,00	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	17,38	19,07	19,25	19,43	19,62	19,80	19,98	20,17	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	71,18	73,76	73,80	73,85	73,90	73,95	74,00	74,05	
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	9,54	9,96	10,00	10,51	10,93	11,12	11,71	12,20	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang merupakan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah urusan Wajib yang tidak berkaitan Pelayanan Dasar : Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025 – 2029 sebanyak 6 (enam) Indikator sebagaimana tabel 4.1 diatas .

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai upaya menjelaskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan keterkaitan serta mendukung komitmen RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Transmigrasi RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional/RPJMN, dinamika serta perubahan perundang-undangan, serta mendasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024, maka perlu dilakukan penyusunan Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Rencana Strategis ini akan menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan/pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi , kewenangan dan peran dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Pada saat Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 belum tersusun maka untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan Renja setelah renstra berakhir, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun pertama Renstra periode berikutnya.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu , konsistensi, kerjasama, dan koordinasi serta tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

POHON KINERJA
DISNAKERTRANS JATENG
TAHUN 2025 - 2029

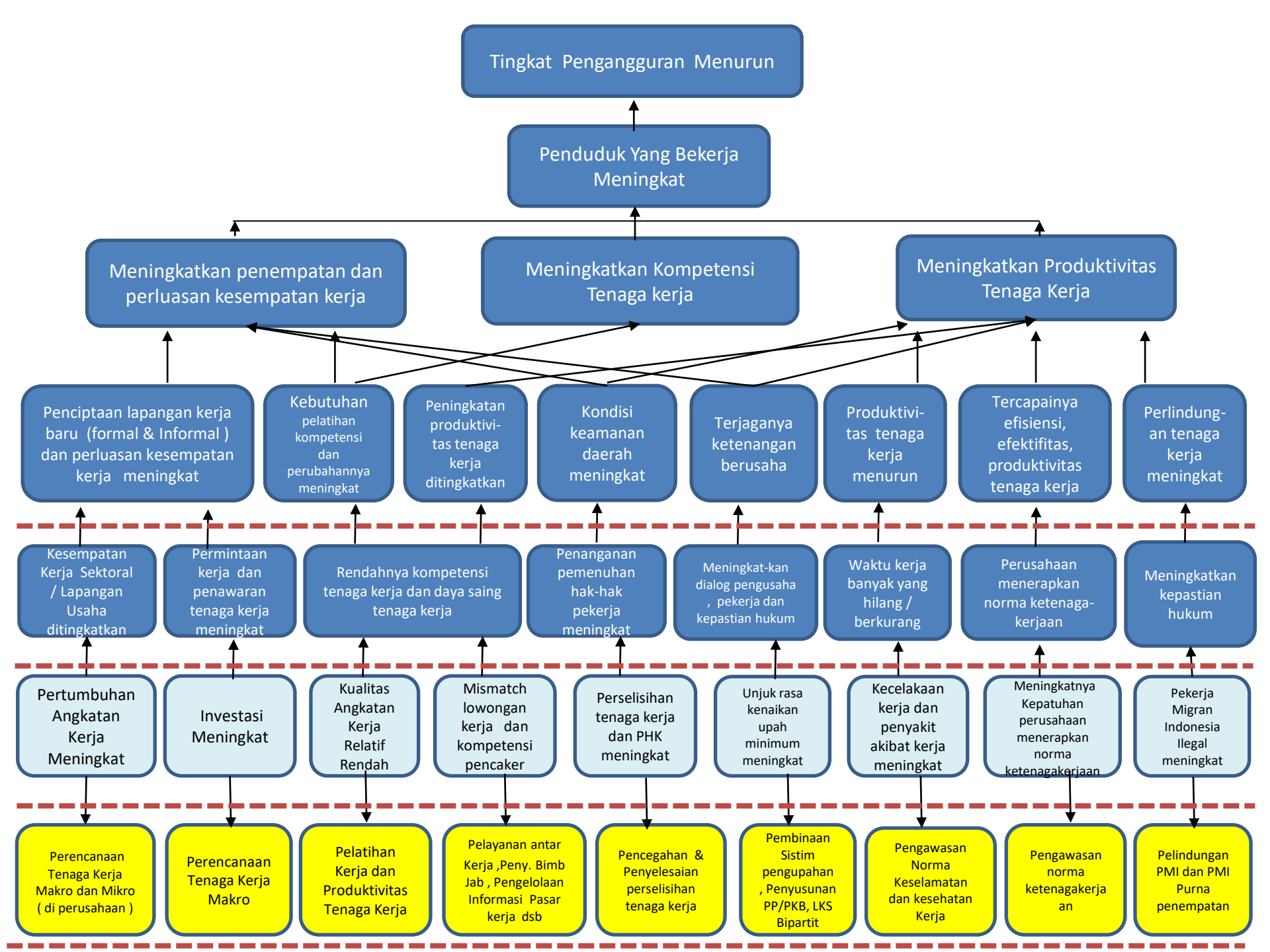
Tingkat Pengangguran Menurun
Penduduk Yang Bekerja Meningkat
Meningkatkan penempatan dan perluasan kesempatan kerja
Meningkatkan Kompetensi Tenaga kerja
Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
Penciptaan lapangan kerja baru (formal & Informal) dan perluasan kesempatan kerja meningkat
Kebutuhan pelatihan kompetensi dan perubahannya meningkat
Peningkatan produktivi-tas tenaga kerja ditingkatkan
Kondisi keamanan daerah meningkat
Terjaganya ketenangan berusaha
Produktivi-tas tenaga kerja menurun
Tercapainya efisiensi, efektifitas, produktivitas tenaga kerja
Perlindung-an tenaga kerja meningkat
Kesempatan Kerja Sektoral / Lapangan Usaha ditingkatkan
Permintaan kerja dan penawaran tenaga kerja meningkat
Rendahnya kompetensi tenaga kerja dan daya saing tenaga kerja
Penanganan pemenuhan hak-hak pekerja meningkat
Meningkat-kan dialog pengusaha , pekerja dan kepastian hukum
Waktu kerja banyak yang hilang / berkurang
Perusahaan menerapkan norma ketenaga-kerjaan
Meningkatkan kepastian hukum
Pertumbuhan Angkatan Kerja Meningkat
Investasi Meningkat
Kualitas Angkatan Kerja Relatif Rendah
Mismatch lowongan kerja dan kompetensi pencaker
Perselisihan tenaga kerja dan PHK meningkat
Unjuk rasa kenaikan upah minimum meningkat
Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja meningkat
Meningkatnya Kepatuhan perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan
Pekerja Migran Indonesia Ilegal meningkat
Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro (di perusahaan)
Perencanaan Tenaga Kerja Makro
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pelayanan antar Kerja ,Peny. Bimb Jab , Pengelolaan Informasi Pasar kerja dsb
Pencegahan & Penyelesaian perselisihan tenaga kerja
Pembinaan Sistim pengupahan , Penyusunan PP/PKB, LKS Bipartit
Pengawasan Norma Keselamatan dan kesehatan Kerja
Pengawasan norma ketenagakerja an
Pelindungan PMI dan PMI Purna penempatan

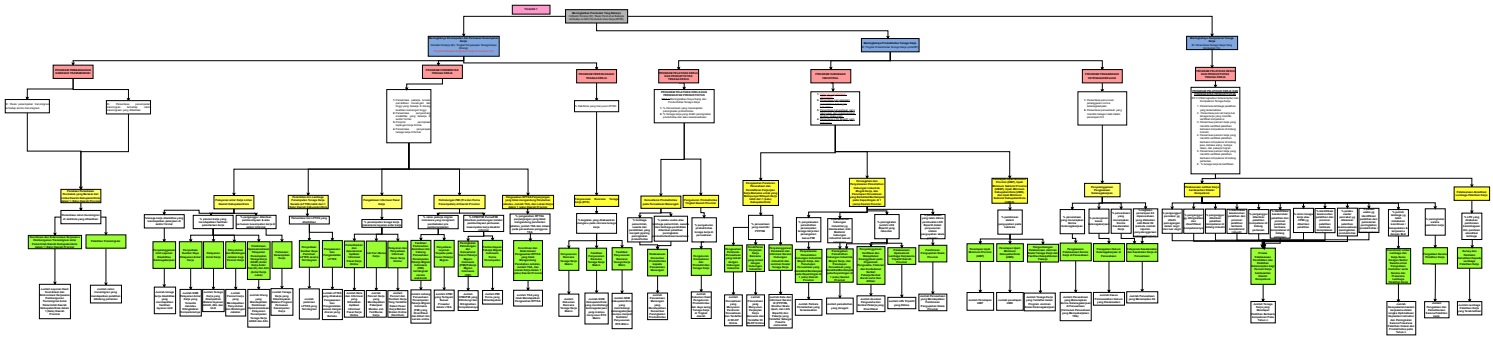

LAMPIRAN 3

Manajemen Resiko Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

a. Identifikasi Resiko

Tabel
Identifikasi Resiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	Risiko Strategis	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja yang inklusif	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran	Balai pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	- Calon Transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi - Daerah Tujuan transmigrasi menolak sebagai lokasi penempatan transmigran, walaupun sudah terbit surat penetapan oleh Pusat /Kementerian Transmigrasi	Risiko Strategis	Kebijakan daerah tujuan transmigrasi terkait penolakan transmigran	Penempatan Transmigrasi tidak memenuhi target	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	Risiko Strategis	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Pemerintah Daerah dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	Risiko Strategis	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	-Pemerintah Daerah dan Masyarakat - Pengusaha dan Pekerja .
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	Risiko Strategis	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"	Pemerintah Daerah dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	Risiko Strategis	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	Masyarakat
7	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	Risiko Strategis	Seseorang sebagai peminat lelang/penjualan aset mempunyai keinginan untuk memenangkan lelang tersebut tanpa prosedur yang benar	Proses lelang/penjualan aset tanpa prosedur sehingga tidak sesuai dengan aturan dan Pengurus barang menjadi ketakutan karena diintimidasi sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja	ASN

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	Risiko Strategis	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)	Msyarakat

b. Analisis Resiko

Tabel
Analisis Resiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	3	4	12	Ada	Menginformasikan persyaratan tersebut kepada pencari kerja termasuk penyandang disabilitas dan stake holder / Dinas Pendidikan dan lainnya yang terkait persyaratan minimal untuk bekerja di perusahaan tsb harus lulus SD /ijazah SD atau penyetaraan . Serta menyampaikan usulan kepada PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	Memadai	3	4	12
- Calon Transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi - Daerah Tujuan transmigrasi menolak sebagai lokasi penempatan transmigran, walaupun sudah terbit surat penetapan oleh Pusat /Kementerian Transmigrasi	3	4	12	Ada	Melakukan Sosialisasi, rekrutmen dan seleksi calon peserta kembali dengan pengganti yang telah diseleksi atau diulang kembali melakukan konsolidasi dengan kab/kota yang bersedia mengirimkan calon transmigran untuk ditempatkan di daerah tujuan, sesuai surat penetapan kuota dari Pusat /Kementerian Transmigrasi . Proses wawancara lebih detail	Memadai	3	3	9
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	3	4	12	Ada	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada pegwai di Kab/Kota/Prov dalam menyusun Dokumen RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di Perusahaan - Melakukan Reviu terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah - Melaporkan hasil keakurasian pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari 6 indikator ketenagakerjaan antara proyeksi /perkiraan dan realisasi nya pada tahun berjalan (Sakernas - BPS)	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	4	4	16	Ada	- Sosialisasi, pelatihan/bimtek peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas baik untuk pencari kerja, tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha baru di masyarakat serta pengusaha / pengelola perusahaan - Perusahaan membuat SOP tentang bidang pekerjaan untuk tenaga kerja -Memaksimalkan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan. Berkoordinasi dengan stakeholder pengusaha , pekerja , serikat pekerja	Memadai	3	4	12
Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	3	4	12	Ada	- Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi - Sosialisasi Rekrutmen magang ke Jepang tidak dikenakan biaya"	Memadai	3	4	12
Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	3	4	12	Ada	" - Menegur yang bersangkutan di kegiatan tersebut untuk mengajukan nota dinas sebelum menggunakan aset - Pengelolaan aset diberikan kepada Pihak lain sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku - Menyusun aturan/kebijakan serta Berita Acara dalam pengelolaan aset berkolaborasi dengan BPKAD Prov. Jateng, Biro APBJ Setda Prov. Jateng, Biro Hukum Setda Prov. Jateng sesuai dengan prosedur yang berlaku"	Memadai	3	4	12
Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	3	4	12	Ada	Melaporkan secara lisan kepada Inspektorat Prov. Jateng	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	3	4	12	Ada	- Menyusun SK Satu Data ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang harus ditanda tangani oleh Gubernur (Tahun 2025 sampai saat ini belum ditanda tangani Gub) yang anggotanya dari Bidang dan UPTD Disnakertrans serta SDM Kab/Kota Dinas yang membidangi ketenagakerjaan. - Mengkoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi ketenagakerjaan dan BPS , Bappeda serta Diskomfo Jateng terkait data dan informasi ketenagakerjaan F34	Memadai	3	4	12

c. Penetapan Resiko Prioritas

Tabel
Resiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja yang inklusif	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing
-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun
-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun
-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"
Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"
Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian
Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian
Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Seseorang sebagai peminat lelang/penjualan aset mempunyai keinginan untuk memenangkan lelang tersebut tanpa prosedur yang benar	Proses lelang/penjualan aset tanpa prosedur sehingga tidak sesuai dengan aturan dan Pengurus barang menjadi ketakutan karena diintimidasi sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)
- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	12	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja yang inklusif	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran	Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan, Pembekalan, dan Pengembangan Aplikasi Ayo Kerjo	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Melakukan pembinaan dan pendampingan pada pegwai di Kab/Kota/Prov dalam menyusun Dokumen RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Melakukan Reviu terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Melakukan Evaluasi dan Monitoring terkait penyusunan RTK Makro / RTK Mikro pada Dinas di Kab/Kota/Prov dan perusahaan di Jateng	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan didaerah . - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing - masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Melakukan Bimtek penyusunan RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di perusahaan bagi Pegawai Kab/Kota/Provinsi dan perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Memaksimalkan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan, Berkolaborasi dengan stake holder pengusaha, pekerja serikat pekerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Sosialisasi, pelatihan/bimtek peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas baik untuk pencari kerja, tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha baru di masyarakat serta pengusaha / pengelola perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan" - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Perusahaan membuat SOP tentang bidang pekerjaan untuk tenaga kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	12	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/ merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"	Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sounding Officers)	12	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan /belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta	Sosialisasi Rekrutmen magang ke Jepang tidak dikenakan biaya	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb."	magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri"			
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	- Pengelolaan aset diberikan kepada Pihak lain sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku Menyusun aturan/kebijakan serta Berita Acara dalam pengelolaan aset berkolaborasi dengan BPKAD Prov. Jateng, Biro APBJ Setda Prov. Jateng, Biro Hukum Setda Prov. Jateng sesuai dengan prosedur yang berlaku	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. -Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	Menegur yang bersangkutan di kegiatan tersebut untuk mengajukan nota dinas sebelum menggunakan aset	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	12	Seseorang sebagai peminat lelang/penjualan aset mempunyai keinginan untuk memenangkan lelang tersebut tanpa prosedur yang benar	Proses lelang/penjualan aset tanpa prosedur sehingga tidak sesuai dengan aturan dan Pengurus barang menjadi ketakutan karena diintimidasi sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja	Melaporkan secara lisan kepada Inspektorat Prov. Jateng	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	12	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)	Mengkoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi ketenagakerjaan dan BPS , Bappeda serta Diskomfo Jateng terkait data dan informasi ketenagakerjaan F34	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya /kurang optimal	12	-Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi , menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat . - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi opersional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan dserta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans)	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik , sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya , kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik - Kemnaker)	Menyusun SK Satu Data ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang harus ditanda tangani oleh Gubernur (Tahun 2025 sampai saat ini belum ditanda tangani Gub) yang anggotanya dari Bidang dan UPTD Disnakertrans serta SDM Kab/Kota Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 – 2023 dan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 – 2025 serta dimulainya pemerintahan yang baru pada tahun 2025, dibutuhkan langkah strategis untuk menyusun arah pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Pada tahun 2024 lalu, telah terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2025 - 2030, sehingga diperlukan penyusunan program dan kegiatan strategis untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta sekaligus mendukung program prioritas pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2024 - 2029.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa Kepala Daerah terpilih berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan yaitu salah satunya adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. **Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045".**

Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, RTRW, KLHS dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau *roadmap* yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha

dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan sebagai berikut : 1) Persiapan penyusunan Renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai renstra PD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi 2) penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah meliputi penyusunan pohon kinerja, cascading, manajemen resiko dan penyusunan dokumen renstra 3) penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 5) perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan 6) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis 5 tahunan ini juga memperhatikan arah kebijakan pusat yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KemendukBangga/BKKBN). Keterkaitan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan dokumen perencanaan lainnya secara detail dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1. 1
Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah
dengan Dokumen Lainnya

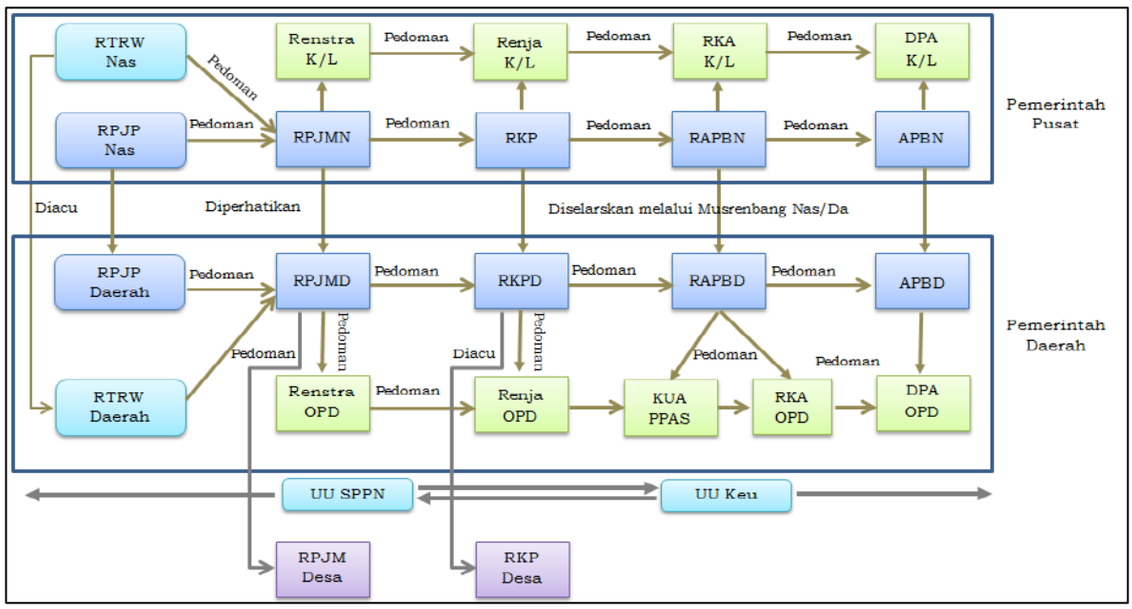

Selanjutnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setiap tahunnya dan dijadikan pedoman dalam mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah sesuai dengan target pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra ini juga diharapkan menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun Renstra/Renja Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di daerah dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Jawa Tengah selama lima tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
23. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
24. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
25. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (6/85/2017) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-12/2018) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-2/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-54/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (4-56/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (5-93/2022) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi JAwa Tengah Nomor 138);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender Dan Anak;
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Satu Data Jawa Tengah;
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi dan yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 21);

45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter dan Rumah penampungan Sementara bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 22);
46. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 33);
47. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
48. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, eksploitasi dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 24).
49. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2045;
50. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
51. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
52. Kepmendagri No 900.1.155-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tahun 2024;
53. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
55. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya;
56. Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah nomor 000.7.2.2/0002764 tanggal 9 April 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029, sesuai dengan tugas dan fungsi serta Urusan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

a. Menjabarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, serta menetapkan strategi dan kebijakan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029;
b. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
c. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
d. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah serta Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah identifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, dan Arah Kebijakan.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah, termasuk indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kesesuaian anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas;

1. **Sekretariat, membawahi :**
   a. Sub bagian Program;
   b. Sub bagian Keuangan;
   c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
2. **Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, membawahi:**
   a. Sub Koordinator Kesetaraan Gender;
   b. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan.
3. **Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, membawahi :**
   a. Sub Koordinator Perlindungan Anak;
   b. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak.
4. **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi:**
   a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk;
   b. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera.
5. **Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, membawahkan :**
   a. Sub Koordinator Keluarga Berencana;
   b. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
6. **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak**
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

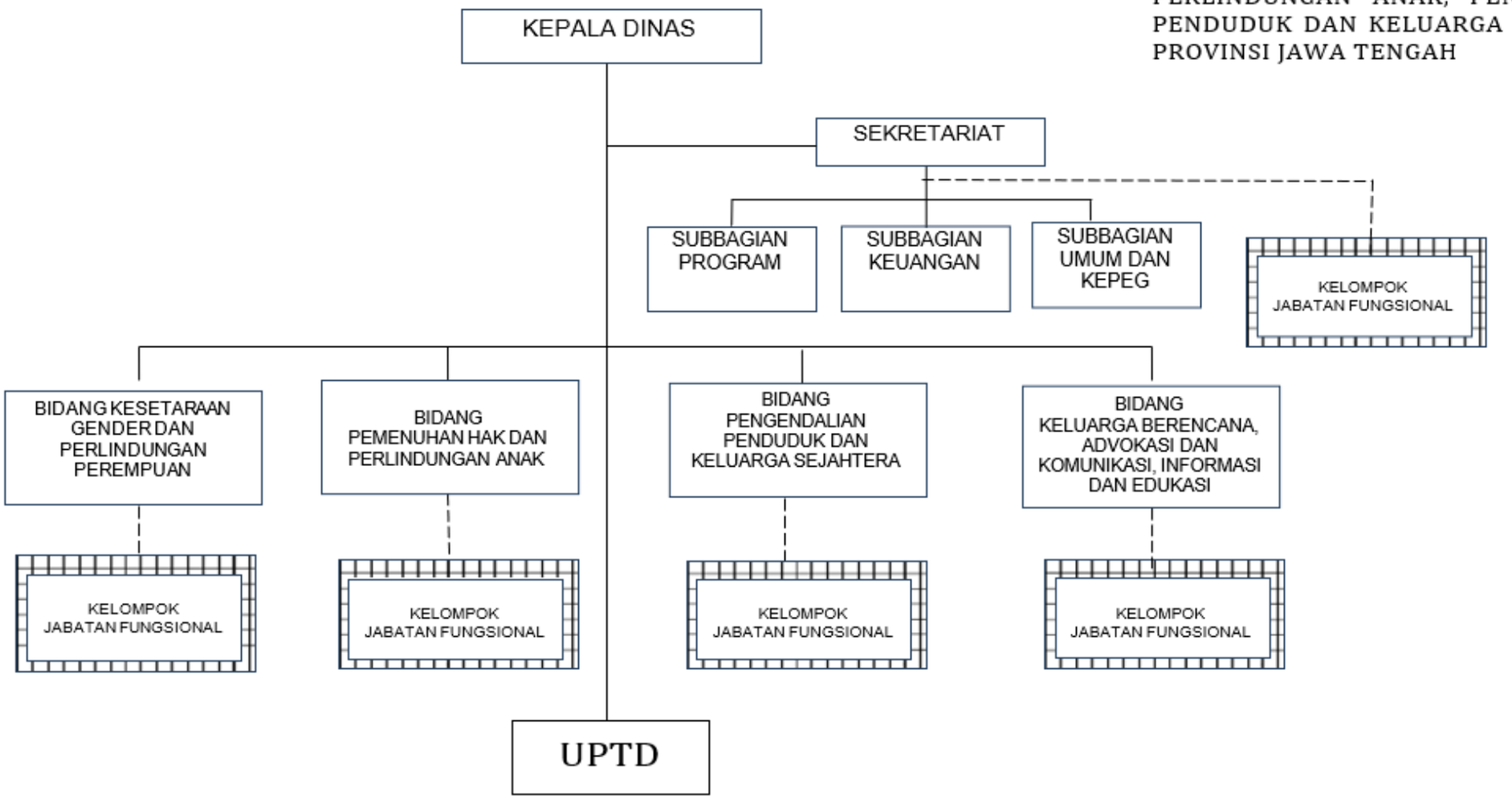

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, dan Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, dan Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, dan Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

4. Penyiapan bahan koordinasi Pendataan dan informasi di lingkungan Dinas;
5. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
6. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
8. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesetaraan Gender;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di perlindungan perempuan;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak mempunyai tugas memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak, melaksanakan fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat;
2. Pelaksanaan penjangkauan korban;
3. Pelaksanaan pengelolaan kasus;
4. Pelaksanaan penampungan sementara;
5. Pelaksanaan mediasi;
6. Pelaksanaan pendampingan korban;
7. Pelaksanaan penatausahaan di lingkungan UPTD; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusianya dan sarana prasarana yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS/PPPK			Non PNS			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	SMP Sederajat	-	-	-	1		1	1
2	SMA Sederajat	3	-	3	2		2	5
3	D1	1	-	1	-	-	-	1
4	D3	1	3	4	-	-	-	4
5	DIV	-	2	2		2	2	4
6	S1	6	22	28	8	5	13	41
7	S2	3	21	24	1	1	2	26
Jumlah		**14**	**48**	**62**	**12**	**8**	**20**	**82**

Sumber : Sub Bagian Umpeg DP3AP2KB, Per-Desember 2024

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak 82 orang, terdiri dari PNS sebanyak 59 orang, PPPK sebanyak 3 dan Non PNS sebanyak 20 orang. Kondisi tersebut telah dipandang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, namun perlu ditingkatkan kemampuan teknis.

Sementara itu, jika dilihat jumlah pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah terbagi atas golongan II sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 40 orang dan golongan IV sebanyak 15 orang serta golongan VII sebanyak 1 dan Golongan XI sebanyak 2 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	I	-	-	-
2	II	3	1	4
3	III	8	32	40
4	IV	1	14	15
Jumlah		**12**	**47**	**59**

Sumber : Sub Bagian Umpeg DP3AP2KB, Desember 2024

Tabel 2. 3
Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Golongan/ Pangkat	L	P	Jumlah
1	VII	1	-	1
2	VIII	-	-	-
3	IX	2	-	2
Jumlah		**3**	**0**	**3**

Sumber : Sub Bagian Umpeg DP3AP2KB, Desember 2024

2.2.2 Sarana dan Prasarana (*Asset*)

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagian besar masih dalam kondisi baik, meskipun demikian, beberapa hal yang harus segera diperbaiki adalah kondisi plafon, ubin pada lantai 1-3 dan perbaikan pada dinding, kamar mandi dan beberapa ruangan kosong yang rusak. Sedangkan kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor seperti sarana prasarana komputer dan sarpras teknologi informasi untuk mendukung era digitalisasi membutuhkan *upgrade* dan tambahan unit.

Di samping itu, kelengkapan ruang pendukung lain seperti ruang rapat untuk *zoom*, ruang *podcast* maupun ruang lain yang mendukung kinerja sangat diperlukan keberadaannya kedepan, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dan berkesinambungan. Terkait dengan kebutuhan kendaraan dinas, pada saat ini terdapat 10 kendaraan operasional roda 4, dari 10 kendaraan tersebut, 6 kendaraan atau 60% nya berusia lebih dari 10 tahun sehingga diperlukan peremajaan. Sedangkan kebutuhan untuk sepeda motor operasional, masih mencukupi.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana pada unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) juga masih diperlukan, mengingat hal tersebut merupakan layanan masyarakat secara langsung, seperti penyediaan sarpras ruang pelayanan, gedung, *meubelair* dan peralatan kantor pendukung lainnya. Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dalam perencanaan ke depan guna mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah secara optimal.

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
I	**Tanah**	**3**	**0**	**3**
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	0	1
II	**Peralatan dan Mesin**	1	0	1
1	**Alat-Alat Besar**	1	0	1
	Potable Generating Set			
	Stationary Generating Set	**6**	0	**6**
	Lain-lain	4	0	4
	Stationary Water Pump	2	0	2
2	**Alat-Alat Angkut**	**23**	0	**23**
	Sedan	1	0	**1**
	Jeep	1	0	**1**
	Multi Purpose Vehicle (MPV)	7	0	**7**
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah	13	0	**13**
	Sepeda Motor	1	0	**1**
	Rescue Car	**3**	**0**	**3**
3	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**754**	**-**	**754**
	Mesin Ketik Listrik	2	-	2
	Lemari Besi/Metal	41	-	41
	Filing Cabinet Besi	27	-	27
	Brandkas	1	-	1
	Lemari Kaca	2	-	2
	Alat Penyimpanan Perlengkapan KTR. Filing Cabinet	17	-	17
	Alat Penyimpanan Perlengkapa KTR. Rak Arsip	3	-	3
	White Board	6	-	6
	Mesin Absensi	4	-	4
	Alat Pemotong Kertas	2	-	2
	White Board Electronic	1	-	1
	LCD Projector/Infocus	2	-	2
	Papan Pengumuman	3	-	3
	Papan Tulis	1	-	1
	Alat Kantor Lainnya. LCD Proyektor	1	-	1
	Alat Kantor Lainnya. Speaker	1	-	1
	Alat Kantor Lainnya. Pompa Air Dabb	1	-	1
	Meja Kerja Kayu	10	-	1
	Kursi Besi/Metal	3	-	3
	Sice	17	-	17
	Meja Rapat	53	-	53
	Tempat Tidur Besi	3	-	3
	Tempat Tidur Kayu	2	-	2
	Meja Resepsionis	2	-	2
	Meja Tambahan	2	-	2
	Kursi Rapat	75	-	75
	Kursi Putar	93	-	93
	Meja Komputer	3	-	3
	Sofa	8	-	8
	Meubelair Rak Kayu	1	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
	Meubelair Meja Kayu/Rotan	14	-	14
	Meubelair Tikar	1	-	1
	Meubelair Lemari Pakaian	6	-	6
	Meubelair Lemari Kayu	2	-	2
	Meubelair Meja Kecil	1	-	1
	Mesin Penghisap Debu/Vaccum Cleaner	2	-	2
	Lemari Es	5	-	5
	AC Sentral	9	-	9
	AC Split	16	-	16
	Kipas Angin	8	-	8
	Exhause Fan	4	-	4
	Televisi	10	-	10
	Amplifier	7	-	7
	Loudspeaker	19	-	19
	Sound System	4	-	4
	Wireless	7	-	7
	Microphone	2	-	2
	Mic Conference	1	-	1
	Unit Power Supply (UPS)	3	-	3
	Stabilisator	1	-	1
	Tustel	1	-	1
	Lambang Garuda Pancasila	1	-	1
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	-	1
	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya/*Home Use)*	1	-	1
	Tangga Alumunium	3	-	3
	Dispenser	15	-	15
	Mimbar/Podium	2	-	2
	Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use). Cassete Recorder*	2	-	2
	Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use*). Kotak Saran	1	-	1
	Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use*). Kotak Sound System	1	-	1
	Lain-lain	13	-	13
	Alat Pemadam/*Portable*	4	-	4
	Panel Pengontrol Kebakaran	1	-	1
	Hidran Kebakaran	1	-	1
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	-	4
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	122	-	122
	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	-	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	-	11
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	45	-	45
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	6	-	6
	Buffet Kayu	3	-	3
	Lemari dan Arsip Pejabat. Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1	-	1
	Lemari dan Arsip Pejabat. *Buffet Kaca*	3	-	3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
4	**Alat Studio Komunikasi dan Pemancar**	**33**	**-**	**33**
	Power Amplifier	1	-	1
	Chairman/*audio Conference*	1	-	1
	Peralatan Studio Visual. Camera + *Attachment*	2	-	2
	Peralatan Studio Visual. Proyektor + Attachment	2	-	2
	Lain-Lain	9	-	9
	Video Switcher	1	-	1
	Mixer Pvc	2	-	2
	Layar Film/Projector	1	-	1
	Camera Digital	1	-	1
	Lain-Lain	3	-	3
	Telephone (Pabx)	4	-	4
	Facsimile	3	-	3
	Alat Komunikasi Telephone. Handphone	1	-	1
	Lain-Lain	2	-	2
5	**Alat Komputer**	**140**	-	**140**
	P.C Unit	68	-	68
	Laptop	8	-	8
	Note Book	10	-	10
	Webcam	2	-	2
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	48	-	48
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	-	3
	Server	1	-	1
III	**Bangunan dan Gedung**			
1	**Bangunan Gedung**	**3**	**-**	**3**
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	-	1
	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	-	1
	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	-	1
2	**Monument**	**3**	-	**3**
	Tugu Peringatan Baleho	3	-	3
IV	**Aset Tetap Lainnya**			
1	**Bahan Perpustakaan**	**732**	**-**	**732**
	Referensi	14	-	14
	Ilmu Pengetahuan Umum	630	-	630
	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	1	-	1
	Umum. Buku. Perpustakaan	22	-	22
	Ilmu Jiwa	2	-	2
	Agama Islam	1	-	1
	Agama Hindu	1	-	1
	Hukum	50	-	50
	Pendidikan	1	-	1
	Pengetahuan Bahasa Indonesia	1	-	1
	Ilmu Kedokteran	1	-	1
	Ilmu Kerumah Tanggaan	6	-	6
	Management dan Perkantoran	1	-	1
	Sejarah	1	-	1
2	**Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga**	**4**	-	**4**
	Alat Kesenian. Alat Musik/Band	1	-	1
	Lain-lain	3	-	3

Sumber : Sub Bagian umum dan Kepegawaian, Desember 2024

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	Nilai				75,14	72,6	71,62	72,7	-	71,73	71,64	73,78	74,18	-	95,46	98,68	103,01	101,76	-
2	Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	%				85,71	88,57	91,43	100	-	91,43	100	100	100	-	106,67	112,9	109,37	100	-
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	per 100.000				8,29	8,22	8,15	8,07	-	8,99	8,97	8,1	8,02	-	92,21	91,64	109,37	100,62	-
4	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%				34,21	34,24	N/A	N/A	-	34,31	34,29	N/A	N/A	-	100,29	100,15	N/A	N/A	-
5	Persentase Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Pemerintah Daerah	%				N/A	N/A	34,27	34,3	-	N/A	N/A	36,11	51,42	-	N/A	N/A	105,37	132,25	-
6	Persentase kabupaten/ kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%				25,71	28,57	60	82,85	-	54,28	62,85	71,42	82,85	-	211,12	219,99	119,03	100,01	-

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%				N/A	N/A	80	90	-	N/A	N/A	80	90	-	N/A	N/A	87,5	100	-
8	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	per 100,000				8,13	7,78	8,05	8,02	-	8,49	8,35	7,47	7,44	-	95,75	93,17	107,76	107,8	-
9	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	angka				2,24	2,3	2,2	2,19	-	2,23	2,09	2,15	2,04	-	100,45	110,04	102,33	107,35	-
10	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	angka				75,1	75,25	64,76	65,17	-	73,26	70,35	65,18	65,7	-	97,55	93,49	100.65	100,81	-
11	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%				21,14	21,14	N/A	N/A	-	22,25	21,99	N/A	N/A	-	105,25	104,02	N/A	N/A	-
12	Indeks pembangunan keluarga	indeks				N/A	N/A	54,38	56,29	-	N/A	-	58,16	63,07	-	N/A	N/A	106,95	112,04	-
13	Nilai Kepuasan Masyarakat	nilai				74	77	80	85	-	81.75	81.75	87,81	90,25	-	110.47	106.17	109.76	106,18	-
14	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai				78,52	78,54	79,05	79,1	-	84,6	87,5	86,99	86,7	-	107,74	111,41	110.04	109,61	-
15	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendamipingan	%				30	30	N/A	N/A	-	30	30	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	yang menjadi pelaku ekonomi																			
16	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	per 100,000				N/A	N/A	6,42	6,84	-	N/A	N/A	7,9	23,62	-	N/A	N/A	123.05	345,32	-
17	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam, mewujudkan kesetaraan gender terlayani	%				100	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-
18	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	%				N/A	N/A	35	40	-	N/A	N/A	63,88	63,88	-	N/A	N/A	182.51	159,7	-
19	Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan	%				5,81	5,76	5,7	5,64	-	5,75	5,11	4,38	4,64	-	101.04	112.72	130.14	121,55	-
20	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis	%				N/A	N/A	35	40	-	N/A	N/A	63,88	63,88	-	N/A	N/A	182.51	159,7	-

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	pemenuhan hak anak																			
21	Persentase kabupaten/kota menuju layak anak minimal tingkat pratama	%				88,57	91,43	94,28	100	-	88,57	88,57	100	100	-	100	96,87	100	100	-
22	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani	%				100	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-
23	Rasio korban kekerasan terhadap anak	rasio				12,66	12,44	12,46	12,36	-	12,15	11,02	10,33	9,86	-	104.20	112.89	120.62	125,35	-
24	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	%				83,33	100	N/A	N/A	-	83,33	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-
25	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	%				8,33	11,42	N/A	N/A	-	6,33	19,44	N/A	N/A	-	75,99	170,23	N/A	N/A	-

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
26	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	%				N/A	N/A	19,44	27,7	-	N/A	N/A	44,44	61,11	-	N/A	N/A	228.60	220,61	-
27	Persentase kelompok tribina yang aktif	%				93	85,57	96,25	96,3	-	99,01	114,46	97,79	96,6	-	106,46	133,76	101.60	100,31	-
28	Persentase UPPKA yang aktif	%				88	68,25	90,5	91	-	96,59	112,61	91,53	92,07	-	109,76	165	101.14	101,18	-
29	Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%				28,15	26,39	29,5	30	-	28,69	28,42	29,58	30,38	-	101,92	107,69	100.27	101,27	-
30	*Unmeetneed* KB	%				13,1	12,66	12,89	12,76	-	12,9	14,29	11,63	8,6	-	101.55	88.59	110.83	148,37	-
31	Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif	%				100	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-
32	Persentase ketercapaian pelayan umum, kepegawaian dan	%				90	90	N/A	N/A	-	90	90	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	-

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	keuangan perangkat daerah																			
33	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%				N/A	N/A	90	90	-	N/A	N/A	90	90	-	N/A	N/A	100.00	100	-
34	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
B	**Renstra PD Tahun 2024-2026**																			
1	Pengeluaran Perempuan PerKapita	Ribu Rupiah per orang per tahun				-	-	-	-	9.900	-	-	-	-	10.892	-	-	-	-	107,84
2	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan	Per 100.000				-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	4,38	-	-	-	-	123,29
3	IPA	Indeks				-	-	-	-	66	-	-	-	-	64,34*	-	-	-	-	97,49
4	% Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%				-	-	-	-	2	-	-	-	-	4,36	-	-	-	-	218

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Indeks				-	-	-	-	73,5	-	-	-	-	87,51	-	-	-	-	119,06
6	Persentase Perempuan yang Dilatih Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Wirausaha	%				-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	100
7	Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Per 100.000				-	-	-	-	4,25	-	-	-	-	4,25	-	-	-	-	100
8	IPHA	Indeks				-	-	-	-	70	-	-	-	-	60,76*	-	-	-	-	86,8
9	IPKA	Indeks				-	-	-	-	75	-	-	-	-	77,86*	-	-	-	-	103,81
10	Angka Kelahiran Total (TFR)	angka				-	-	-	-	2,13	-	-	-	-	2,03	-	-	-	-	104,93
11	% Peningkatan kelompok UPPKA yang menjadi wirausaha	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks				-	-	-	-	87,9	-	-	-	-	88,87	-	-	-	-	101,1
13	Indeks Manajemen Risiko	Indeks				-	-	-	-	2,75	-	-	-	-	2,92					106,18
14	Persentase pemda yang mereplikasi PPEP atau Program Pemberdayaan	%				-	-	-	-	60	-	-	-	-	80	-	-	-	-	133,33

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	Ekonomi Perempuan																			
15	% Kab/Kota yang menyediakan layanan Kualitas Keluarga Terstandar (jumlah puspaga terstandar , KPPPA)	%				-	-	-	-	14,29	-	-	-	-	22,86	-	-	-	-	159,97
16	% Ketersediaan Data Pilah Gender dan Anak oleh kab/kota dan OPD Prov pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA Prov)	%				-	-	-	-	25	-	-	-	-	25,71	-	-	-	-	102,84
17	Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standart	%				-	-	-	-	11	-	-	-	-	28,57	-	-	-	-	259,73
18	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
19	Persentase Kab/kota yang	%				-	-	-	-	77,14	-	-	-	-	100	-	-	-	-	120,7

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
	mencapai predikat KLA minimal tingkat Madya																			
20	Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.000				-	-	-	-	11,9	-	-	-	-	11,8	-	-	-	-	103,14
21	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
22	Persentase mCPR	%				-	-	-	-	65.58	-	-	-	-	65,5	-	-	-	-	
23	Unmetneed KB	%				-	-	-	-	10	-	-	-	-	9,3	-	-	-	-	128,37
24	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	%				-	-	-	-	51	-	-	-	-	75	-	-	-	-	122,73
25	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%				-	-	-	-	32	-	-	-	-	36,45	-	-	-	-	130,18
26	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%				-	-	-	-	90	-	-	-	-	90	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Persngkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23
27	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%				-	-	-	-	45	-	-	-	-	45	-	-	-	-	100

Pada tabel 2.5 diatas, bahwa kinerja indikator tujuan, sasaran dan program pada Renstra Perangkat Daerah (PD) tahun 2018-2023 serta realisasi capaian Renstra PD tahun 2024 – 2026, hampir tidak ada kesenjangan antara target dan realisasinya. Hampir semua capaian kinerja selalu diatas target yang ada.

Beberapa capaian kinerja indikator terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Jawa Tengah antara lain :

Tabel 2. 6
Capaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2022

TAHUN	KATEGORI
2013	UTAMA
2014	MENTOR
2016	MENTOR
2018	MENTOR
2020	MENTOR
2022	MENTOR

Sumber : KPPA RI

Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan 5 (lima) kali berturut-turut Provinsi Jawa Tengah memperoleh Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Kategori Mentor 5 kali berturut-turut. Kategori Mentor merupakan Kategori tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA RI) kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah atas komitmen dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah mendukung implementasi PUG sebagai upaya menciptakan pembangunan kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dan anak sebagaimana Asta Cita ke-4.

Tabel 2. 7
Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022 – 2024

Tahun	Pagu Belanja Operasi Dan Modal	Anggaran Responsif Gender	%
2022	15.170.639.064.973	2.000.603.046.000	13,19
2023	4.124.573.082.000	491.029.670.000	11,90
2024	10.294.183.557.000	1.069.116.041.338	10,39

Sumber : Bidang KGPP, 2024

Anggaran Responsif Gender (ARG) di Jawa Tengah masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Beberapa upaya yang dilakukan adalah pendampingan dan evaluasi menyeluruh di masing-masing OPD dan peningkatan kapasitas pelaksana di masing-masing OPD untuk

menganalisis dan mencermati anggaran yang sudah disusun agar mempunyai dukungan untuk berkontribusi dalam pembangunan responsif gender dan anak di Jawa Tengah.

Gambar 2. 1
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional
Tahun 2020-2024

Sumber: *bps.go.id* | Publikasi Gender BPS 2024 menggunakan metode *longform*

Tren positif peningkatan IPG terjadi di Jawa Tengah maupun secara nasional selama periode 2020 hingga 2024. Kenaikan IPG ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Jawa Tengah semakin baik dari waktu ke waktu. Jawa Tengah selalu berada di atas angka nasional selama periode ini. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program terkait pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, walaupun belum sepenuhnya berdampak secara optimal.

Gambar 2. 2
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional
Tahun 2019-2024

Sumber: *bps.go.id* | Publikasi Gender BPS April 2024

IDG Jawa Tengah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,6 dari 74,18 menjadi 72,58, tetapi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

IDG Jawa Tengah selalu berada dibawah angka nasional. Hal tersebut dikarenakan bahwa pengaruh keterwakilan perempuan di parlemen sangat tinggi. Secara akumulatif jumlah keterwakilan perempuan di parlemen Provinsi Jawa Tengah selalu dibawah 30%, sehingga saat ini upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam berbagai bidang dan level terus dilakukan secara masif.

Gambar 2. 3
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

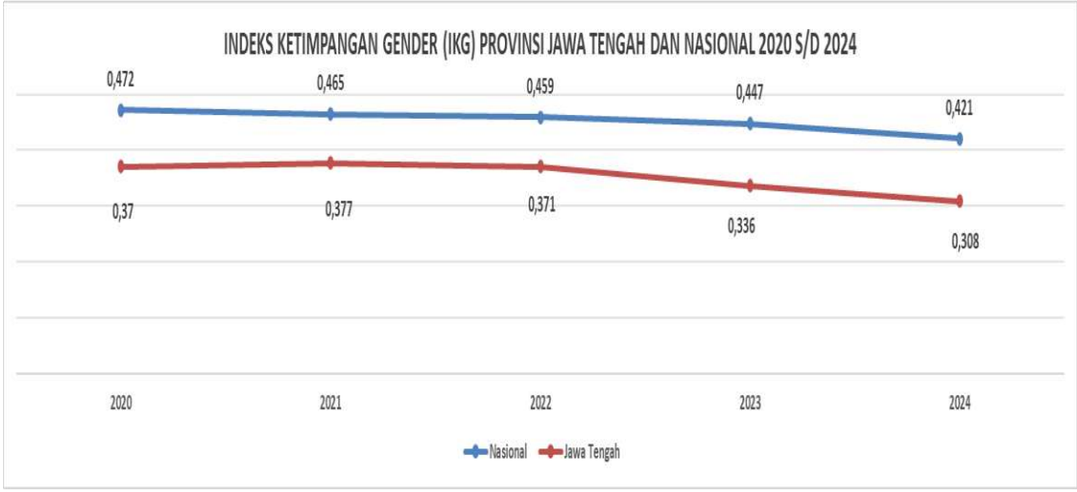

Sumber : BPS Jawa Tengah

Nilai IKG Jawa Tengah masih dibawah angka nasional, beberapa komposit yang mempengaruhi antara lain proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih tinggi, adanya angka perkawinan anak mendorong kenaikan proporsi perempuan yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun, dan persentase keterwakilan perempuan yang duduk di legislatif mengalami stagnasi atau bahkan penurunan. Sedangkan persentase perempuan usia 25 tahun keatas dengan pendidikan SMA dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Tabel 2. 8
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Partai Politik	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Demokrat	6	1	7
2	Gerindra	14	3	17
3	Golkar	14	3	17
4	Amanat Nasdem Solidaritas	9	0	9
5	PDIP	24	9	33
6	PKB	15	5	20
7	PKS	10	1	11
8	PPP	4	2	6
Total		**96**	**24**	**120**

Sumber : *dprd.jatengprov.go.id*

Berdasarkan tabel diatas jumlah anggota legislatif perempuan sebanyak 24 orang atau 20% dari total keseluruhan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah hasil pemilihan umum tahun 2024 lalu. Hal ini menunjukkan masih timpangnya keterwakilan antara perempuan dan laki-laki yang duduk di parlemen. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain, masih adanya budaya patriarkhi di masyarakat, peran ganda perempuan, kapasitas politik dan kader potensial perempuan yang belum optimal.

Tabel 2. 9
Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten Kota	Kepala Keluarga Perempuan	Kepala Keluarga Perempuan Miskin	%
1	CILACAP	87.175	36.946	42
2	BANYUMAS	81.921	11.459	14
3	PURBALINGGA	38.045	21.016	55
4	BANJARNEGARA	37.183	14.643	39
5	KEBUMEN	56.736	19.665	35
6	PURWOREJO	41.129	11.715	28
7	WONOSOBO	32.549	11.403	35
8	MAGELANG	57.125	20.714	36
9	BOYOLALI	46.474	7.070	15
10	KLATEN	70.160	17.014	24
11	SUKOHARJO	41.978	2.288	5
12	WONOGIRI	47.759	19.463	41
13	KARANGANYAR	41.206	3.404	8
14	SRAGEN	55.425	3.074	6
15	GROBOGAN	78.896	29.008	37

16	BLORA	46.038	13.567	29
17	REMBANG	29.253	5.768	20
18	PATI	78.642	13.973	18
19	KUDUS	40.632	4.007	10
20	JEPARA	61.659	7.333	12
21	DEMAK	54.705	24.882	45
22	SEMARANG	47.576	9.783	21
23	TEMANGGUNG	29.445	14.687	50
24	KENDAL	52.405	4.666	9
25	BATANG	35.002	13.905	40
26	PEKALONGAN	41.822	4.691	11
27	PEMALANG	60.030	17.242	29
28	TEGAL	54.726	5.542	10
29	BREBES	59.113	16.022	27
30	KOTA MAGELANG	7.259	1.748	24
31	KOTA SURAKARTA	32.074	7.445	23
32	KOTA SALATIGA	10.403	2.782	27
33	KOTA SEMARANG	74.312	11.592	16
34	KOTA PEKALONGAN	16.379	1.973	12
35	KOTA TEGAL	15.446	1.532	10
TOTAL		**1.660.682**	**412.022**	**25**

Sumber : Dinsos Provinsi Jawa Tengah

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih di angka 9,48% pada bulan maret 2025, turun 0,10% dari 9,58% pada bulan september 2024, kemiskinan tersebut tentu berpengaruh terhadap perempuan dan anak yang terdampak kemiskinan. Permasalahan perempuan dari keluarga miskin di Jawa Tengah bukanlah isu tunggal, melainkan menjadi persoalan yang bersifat multidimensi: ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan politik, sehingga hal tersebut mempengaruhi secara nyata kualitas hidup perempuan itu sendiri dan anak sebagai bagian dari keluarga. Tanpa intervensi yang terintegrasi, perempuan miskin akan terus berada dalam lingkaran kerentanan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih responsif gender dan berpihak pada kelompok rentan, melalui penguatan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan secara menyeluruh.

Gambar 2. 4
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional
Tahun 2019-2023

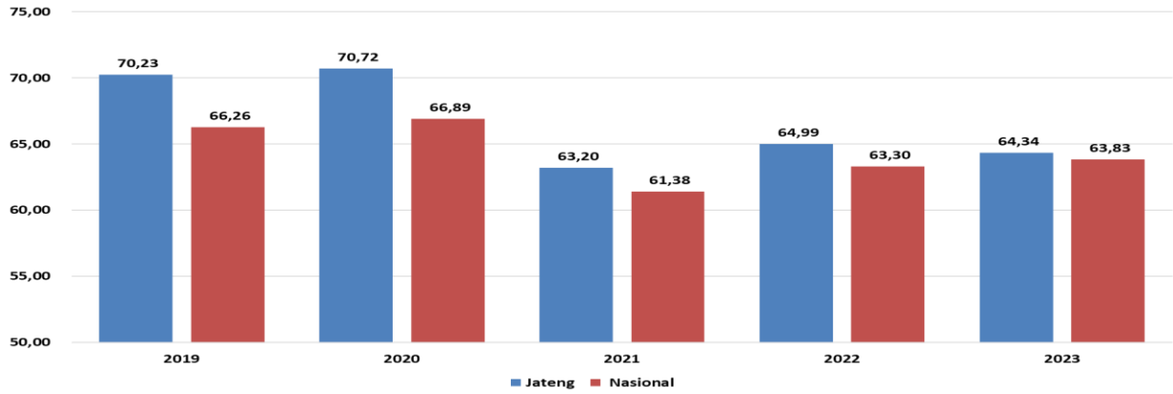

Sumber : Kementerian PPPA RI

Capaian IPA di Provinsi Jawa Tengah masih lebih tinggi dari capaian nasional, meskipun demikian upaya untuk mendorong implementasi kebijakan perlindungan anak terus dilakukan. Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, menegaskan kewajiban pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk ikut mendorong kebijakan ramah anak di semua bidang kehidupan.

Gambar 2. 5
Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024

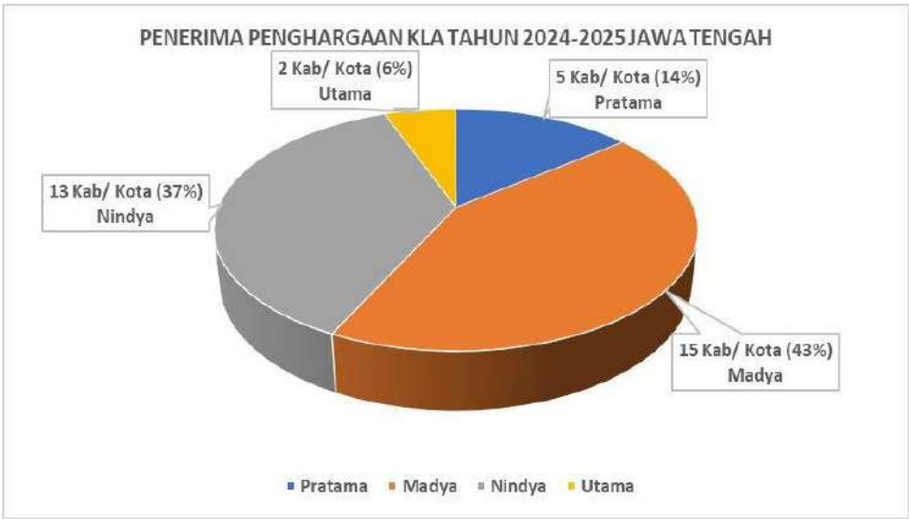

Sumber : KPPPA RI

Tabel 2. 10
Rincian Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak
Tahun 2024

Kategori KLA	Kabupaten/Kota	Jumlah
Pratama	Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Purwoejo, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Wonosobo	5
Madya	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal,	15

	Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Salatiga	
Nindya	Kota Surakarta, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Klaten,Kabupaten Blora, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali,Kota Tegal, Kabupaten Rembang, dan Kota Magelang	13
Utama	Kota Semarang , dan Kabupaten Sragen	2

Sumber : KPPPA RI

Pada tahun 2024, Jawa Tengah mendapat predikat Provinsi Layak Anak (Provila). Hal tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan semua Kabupaten/Kota menjadi Layak Anak, sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Capaian ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan isu perempuan dan anak sebagai prioritas pembangunan sosial, serta mendukung implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan pemenuhan hak dasar anak.

Gambar 2. 6
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2023

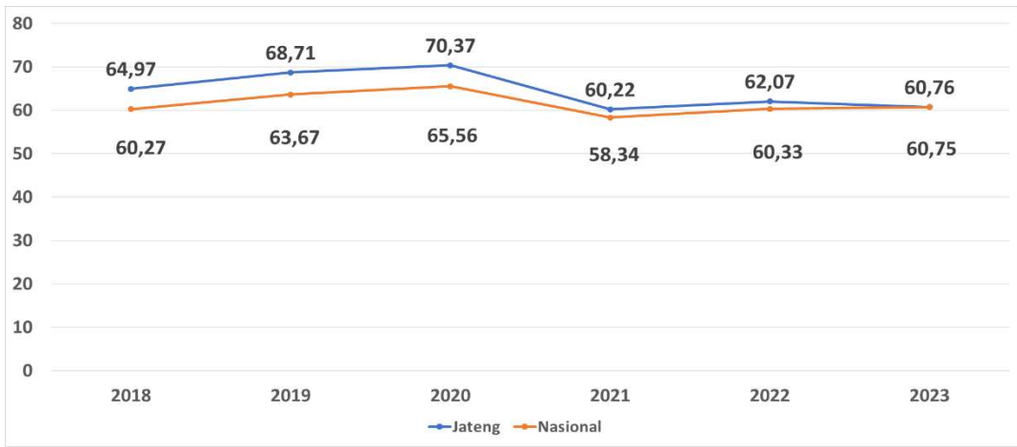

Sumber : *siga.kemenppa.go.id*

Kondisi capaian IPHA di Jawa Tengah mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 karena adanya pandemi *covid-19*, kemudian naik pada tahun 2022 tetapi menurun lagi pada tahun 2023, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah implementasi komposit pembentuk indeks pemenuhan hak anak masih rendah, aspek tersebut meliputi pendidikan waktu luang/budaya dan kesejahteraan dasar seringkali relatif masih rendah didaerah.

Gambar 2. 7
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2023

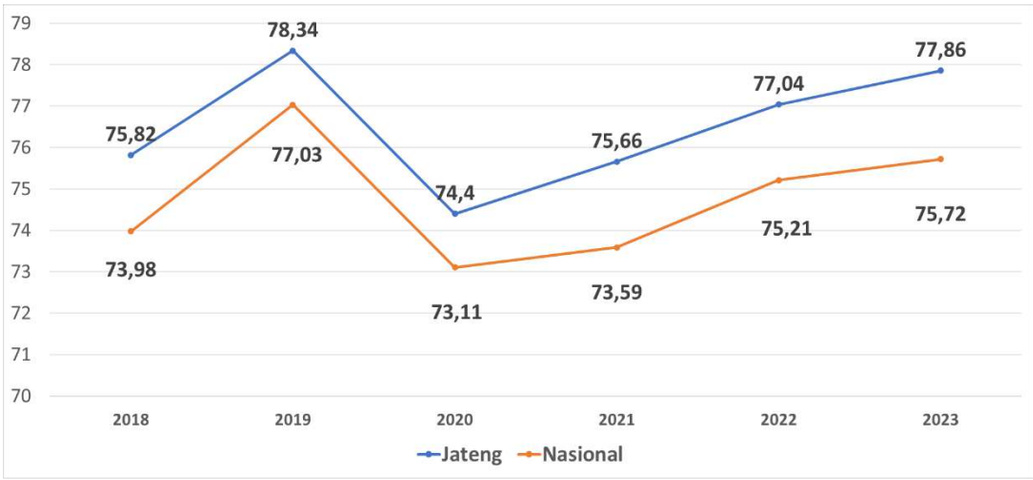

Sumber : siga.kemenppa.go.id

Capaian IPKA Jawa Tengah menunjukkan kenaikan yang signifikan meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam karena wabah pandemi. Meski demikian, dari tahun ke tahun angka IPKA Jawa Tengah berada diatas rata-rata nasional. Beberapa kendala dalam meningkatkan IPKA didaerah antara lain masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, masih banyaknya anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah, sistem perlindungan anak berbasis masyarakat kurang optimal. Oleh karena itu, penggerakan unsur *pentahelix* sebagai upaya mendorong sistem yang berpihak kepada hak-hak anak harus terus dilakukan secara masif.

Gambar 2. 8
Grafik Perkawinan Dibawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

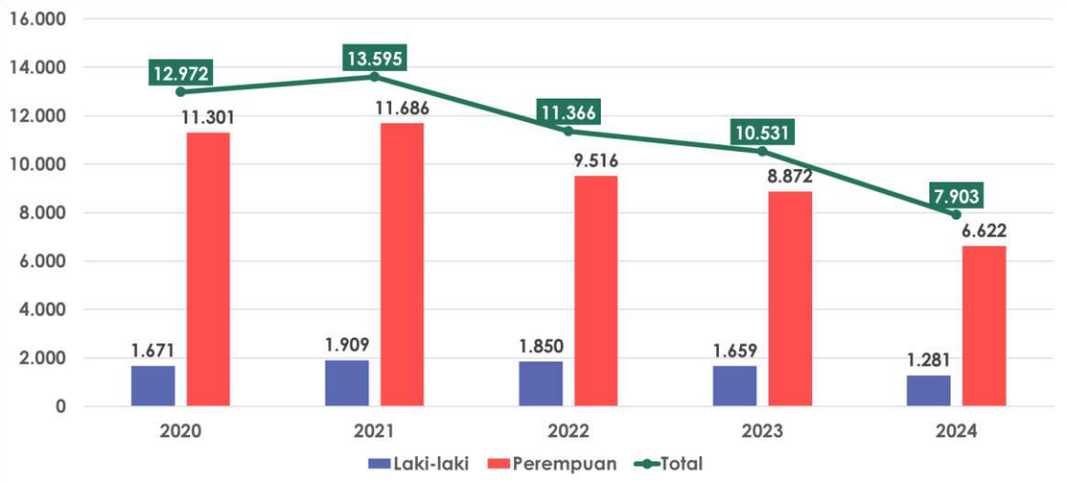

Sumber : Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah

Angka perkawinan anak di tingkat Provinsi Jawa Tengah semakin menurun, tetapi angkanya masih mengkhawatirkan. Perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki yang melakukan perwakinan pada usia anak sangat timpang. Perkawinan anak yang didominasi perempuan mencerminkan adanya ketidaksetaraan gender struktural. Perempuan lebih rentan dinikahkan muda karena faktor ekonomi, norma sosial budaya, serta kontrol atas tubuh dan seksualitasnya masih rendah. Jika tidak ada intervensi serius, perkawinan anak akan terus memperkuat lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, serta menghambat tercapainya target pembangunan manusia.

Tabel 2. 11
Jumlah Disabilitas Di Jawa Tengah s/d Tahun 2024

JENIS DISABILITAS	TOTAL 59.354
Disabilitas Fisik	6.331
Disabilitas Sensorik	2.648
Disabilitas Mental	5.185
Disabilitas Ganda	2.258
JUMLAH DISABILITAS ANAK	16.422
Disabilitas Fisik	16.408
Disabilitas Sensorik	8.126
Disabilitas Mental	15.331
Disabilitas Ganda	3.067
JUMLAH DISABILITAS PEREMPUAN	42.932

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Perempuan dan anak penyandang disabilitas di Jawa Tengah menghadapi tantangan ganda yaitu sebagai kelompok miskin dan rentan, serta karena stigma dan diskriminasi yang membatasi hak-hak mereka. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Perda dan program inklusi sudah ada, namun masih perlu optimalisasi dalam implementasinya. Arah kebijakan harus berfokus pada pendidikan inklusif, perlindungan dari kekerasan, akses kesehatan dan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan regulasi berbasis data terpilah.

Gambar 2. 9
Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

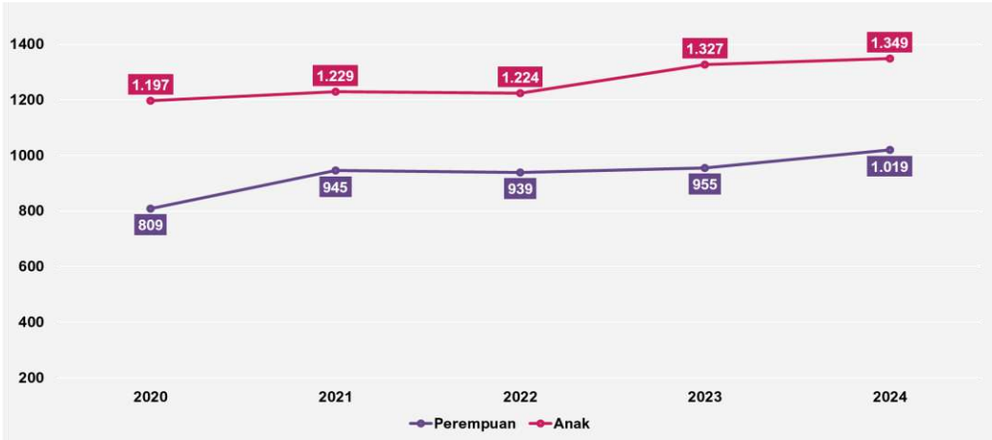

Sumber : Simfoni PPA, Kementerian PPPA

Meningkatnya Angka kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah, salah satunya karena makin tingginya *bullying* dan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Upaya melalui kegiatan pencegahan membutuhkan pendekatan komprehensif & kolaboratif, mulai dari memperkuat ekonomi keluarga, memperbarui norma budaya, edukasi digital, hingga memperluas akses dan efektivitas lembaga perlindungan serta penegakan hukum yang responsif perempuan dan anak.

Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja terkait urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah antara lain :

a. Program gerakan Jo Kawin Bocah untuk mendukung penurunan angka perkawinan usia anak serta merupakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di daerah.
b. Kerjasama lintas sektor unsur *Pentahelix* dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik melalui perjanjian kerjasama maupun kolaborasi kegiatan.
c. Peningkatan kapasitas tenaga dan SDM Penyedia layanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mendorong kualitas layanan dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
d. Kerjasama lintas sektor untuk optimalisasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan mendorong pembiayaan non APBD seperti Baznas dan CSR lainnya.

Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah antara lain :

a. Semakin banyaknya kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).
b. Masih banyaknya kasus kekerasan dilingkungan pendidikan atau dipondok pesantren.
c. Sistem Perlindungan Anak berbasis masyakarat belum optimal.

d. Terkendalanya akses pemasaran perempuan yang sudah dilatih ketrampilan ekonomi.
e. Masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum membentuk UPTD PPA dalam rangka optimalisasi penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.
f. Pemanfaatan Data Pilah Gender dan Anak belum optimal dalam mendorong kebijakan responsif perempuan dan anak di daerah.

Capaian indikator terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

Berdasarkan hasil proyeksi BKKBN, *Total Fertility Rate (TFR*) Jawa Tengah tercatat sebesar 2,03 pada tahun 2024, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 sebesar 2,04. Capaian ini lebih rendah dibanding rata-rata nasional 2,2 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan Jawa Tengah sudah mencapai *replacement level fertility*, yang menjadi fondasi penting dalam menciptakan keluarga berkualitas dan mendukung pembangunan kependudukan berkelanjutan. Tantangan disparitas antar wilayah dan isu perkawinan anak harus segera diatasi, agar capaian ini tidak hanya terjaga tetapi juga memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2. 12
***Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* Provinsi Jawa Tengah**

TAHUN	PASANGAN USIA SUBUR	PESERTA KB AKTIF	CPR
2020	6.525.048	4.757.722	73,26
2021	6.408.024	4.508.188	70,35
2022	6.669.158	4.346.881	65,18
2023	5.689.002	3.938.332	69,23
2024	5.784.989	4.026.574	65,5

Sumber: *newsiga-siga.bkkbn.go.id*

Capaian *CPR* di Jawa Tengah yang berada di kisaran 65–69% pada 2022–2024 mencerminkan keberhasilan program KB dalam menjangkau masyarakat luas. Kontribusi ini sangat signifikan dalam menekan *TFR* ke level dibawah 2,1. Ke depan, tantangan utama terletak pada peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan integrasi program KB dengan agenda pembangunan keluarga berkualitas.

Tabel 2. 13
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Peserta KB Aktif	Peserta KB MKJP					
		IUD	MOW	MOP	IMPLAN	Jumlah	%
2020	4.757.722	447.567	232.244	25.658	659.332	1.364.801	28.69
2021	4.508.188	419.097	222.844	22.017	617.177	1.281.135	28,42
2022	4.346.881	386.774	199.958	19.219	679.991	1.285.942	29,58
2023	3.938.332	350.929	166.690	8.802	495.974	1.022.395	25,96
2024	4.026.574	363.362	169.528	7.921	543.737	1.084.548	26,93

Sumber : BKKBN Jawa Tengah

Persentase capaian penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir. Pada saat pandemi *covid-19*, capaian masih relatif stabil, tetapi pasca pandemi capaian KB MKJP menurun, hal tersebut disebabkan masyarakat lebih cenderung memilih KB jangka pendek atau KB alami yang lebih praktis dan tidak memerlukan operasi.

***Tabel 2. 14 Unmeetneed* Provinsi Jawa Tengah**
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah PUS	Jumlah (orang)	Unmet Need KB (%)
2020	6.525.048	839.434	12,86
2021	6.408.024	915.523	14,28
2022	6.669.158	687.858	11,63
2023	5.689.002	660.799	11,62
2024	5.784.989	538.004	9,3

Sumber : BKKBN Provinsi Jawa Tengah

Tingginya *Unmeetneed* pada tahun 2020 dan 2021, disebabkan oleh dampak pandemi *covid-19* yang membatasi akses layanan KB dan menyebabkan banyak pasangan tidak mendapatkan alat/layanan kontrasepsi. Setelah puncaknya di 2021, angka *unmetneed* mulai menurun secara konsisten ke 11,63% di 2022 dan stabil di 11,62% di 2023. Ini bisa menunjukkan mulai pulihnya layanan kesehatan, termasuk akses KB. *Unmetneed* turun drastis menjadi 9,3 %. Hal ini mencerminkan keberhasilan program KB yang lebih intensif, peningkatan edukasi, serta kesadaran pasangan usia subur terhadap penggunaan alat kontrasepsi.

Gambar 2. 10
Grafik Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

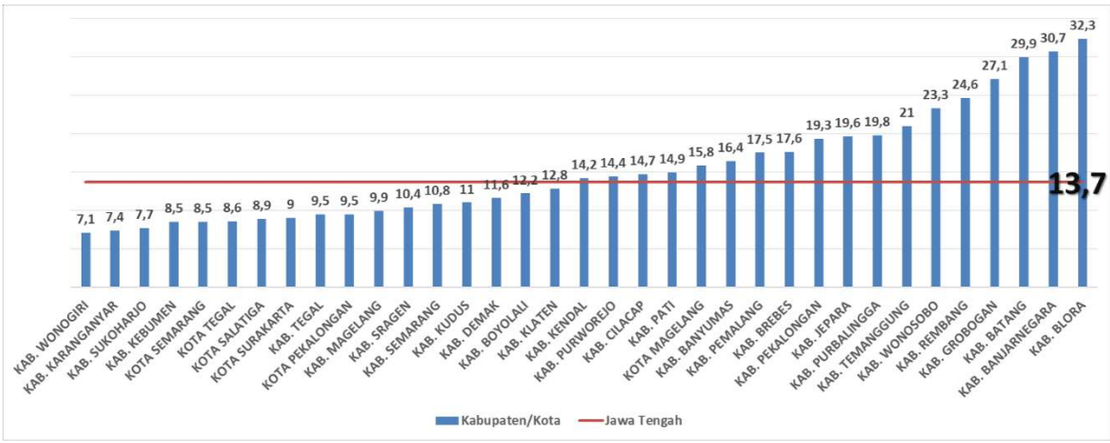

Sumber : BKKBN Provinsi Jawa Tengah

Capaian *ASFR* remaja (15–19 tahun) di Jawa Tengah sebesar 13,7 per 1.000 perempuan pada tahun 2024, menurun dibanding tahun 2023 sebesar 17,3 dan 2022 sebesar 23,09 per 1000 perempuan. Upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian *ASFR* antara lain edukasi reproduksi remaja, akses KB inklusif, dan program pencegahan pernikahan dini.

Gambar 2. 11
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Ketentraman	Kemandirian	Kebahagian	iBangga
2020	62,17	61,8	56,83	**60,27**
2021	58,46	54,6	55,22	**56,1**
2022	60,54	54,31	59,62	**58,16**
2023	60,69	55,39	73,13	**63,07**
2024	62,7	55,1	73,9	**63,9**

Sumber : BKKBN Jawa Tengah

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) di Jawa Tengah menunjukan hasil yang positif karena meningkat setiap tahun. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2021, tetapi naik sampai di angka 63,9 pada tahun 2024. 2 dari 3 dimensi mengalami kenaikan kecuali dimensi kemandirian yang menurun, sehingga kedepannya komposit pembentuk dari dimensi kemandirian harus ditingkatkan.

Tabel 2. 15
Capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023

Tahun	Jawa Tengah	Indonesia
2021	67,21	63,87
2022	67,22	64,16
2023	72,63	69,51

Sumber : BPS

Capaian IPKK Jawa Tengah sudah diatas capaian nasional, walaupun kenaikan capaian Jawa Tengah hampir stagnan pada tahun 2021-2022, tetapi pada tahun 2023 sudah naik secara signifikan. Kenaikan nilai indeks ini merefleksikan perbaikan dalam berbagai dimensi ketahanan keluarga, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga kualitas pengasuhan dan perlindungan anggota keluarga. Kenaikan indeks juga menunjukkan bahwa keluarga semakin berdaya dalam menghadapi tantangan sosial ekonomi, ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi keluarga dalam kegiatan ekonomi produktif dan semakin meningkatnya praktik pengasuhan yang ramah anak.

Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

a. Adanya Kader KB ditingkat Desa dalam rangka mendukung peran dan fungsi PLKB meningkatkan KIE KB dan keluarga di Desa;
b. Mitra lintas sektor untuk mendukung penggerakan KB dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa;
c. Komitmen Kabupaten/Kota untuk menyusun GDPK 5 pilar;
d. Meningkatnya sekolah yang sudah mengimplementasikan program Sekolah Siaga Kependudukan.

Beberapa hambatan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

a. Kurangnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat karena keterbatasan jumlah tenaga penyuluh KB dilapangan, terutama pada masyarakat didaerah terpencil maupun perbatasan;
b. Belum optimalnya peran kader Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendorong ketahanan keluarga;
c. Belum Kabupaten/Kota yang sudah menyusun GDPK 5 pilar, mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan di daerahnya masing-masing.

Capaian indikator terkait urusan Penunjang Pemerintahan antara lain :

Tabel 2. 16
Capaian Sakip dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022 – 2024

Tahun	NILAI SAKIP	INDEKS RB
2022	86,70	-
2023	87,90	83,90
2024	87,30	87,57

Sumber : Sub bagian Umpeg dan Program, 2024

Capaian nilai Sakip dan indeks RB pada Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah selalu dinamis tetapi cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan tata kelola pada internal dinas sudah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Tata kelola pemerintahan yang dinamis diwujudkan melalui penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program urusan PPPA dan Dalduk KB. Hal ini berarti setiap kebijakan dan program kerja perlu dukungan data yang akurat, responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak dan keluarga serta mampu menjawab isu-isu strategis yang ada didaerah.

Tabel 2. 17
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					Anggaran pada Tahun ke-APBD Tahun (Rp.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja	12.401.286	20.601.602	20.748. 444	22.021. 292	22.414.825	12.401.286	20.601.602	20.748.444	22.021.292	22.414.825
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.159.198.935	19.888.357.988	20.202.033.061	21.516.700.427	21.882.164.193	98,05	96,54	97,37	97,71	97,62	2.002.707.800	1.944.593.052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada Tabel 2.17 diatas, rasio anggaran belanja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 95% yang berarti bahwa serapan anggaran untuk mendukung target kinerja sudah optimal, dengan tetap memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas kegiatan. Beberapa permasalahan keterserapan anggaran paling rendah yaitu pada tahun 2021, sebesar 96,54%, karena munculnya wabah *covid-19* yang mengakibatkan anggaran mengalami *refocusing*, banyak pegawai yang terdampak *covid-19* sehingga pelayanan dan kegiatan dilakukan secara daring/*zoom,* sedangkan kegiatan yang tetap harus dilakukan secara *offline,* dibatasi oleh waktu dan jumlah peserta. Walaupun demikian, target kinerja urusan PPPA dan Dalduk KB yang sudah direncakan sebelumnya tetap tercapai.

Analisis terhadap potensi dan permasalahan merupakan langkah krusial untuk memetakan kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan tantangan yang harus diatasi dalam periode Renstra Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Sintesis dari evaluasi kondisi umum tahun sebelumnya menunjukkan adanya modalitas yang kuat sekaligus hambatan struktural yang signifikan dalam 4 (empat) area utama: kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tata kelola pemerintahan.

Dinas Perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi pemerintah yang memiliki mandat strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan mandat tersebut dan menjadi motor penggerak perubahan sosial, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Keluarga melalui kebijakan, program dan regulasi yang telah disahkan, seperti Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

Jejaring lintas sektor mitra kerja dinas, tidak terbatas pada Dinas/UPTD PPA di daerah maupun instansi vertikal seperti BKKBN Perwakilan Jawa Tengah, jaringan lintas sektor juga telah dibangun mencakup organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga profesi dan dunia usaha yang diinisiasi ataupun tumbuh secara organik yang bergerak untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Upaya kolaborasi efektif lintas sektor dengan mitra terkait dibangun agar keberlanjutan program kegiatan dapat dilaksanakan secara komprehensif dan integratif serta memberikan dampak pada pencapaian target secara optimal.

Kolaborasi tersebut mendorong adanya pembiayaan selain non APBD melalui *CSR*, Baznas dan sumber lain yang tidak mengikat seperti

kerjasama kegiatan dengan UNICEF yang memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya anak di Jawa Tengah, kerjasama dengan perguruan tinggi melalui KKN tematik untuk pencegahan perkawinan anak dan masih banyak kolaborasi lain yang membantu meningkatkan kinerja urusan PPPA dan Dalduk KB.

2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2. 18
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan	Masih adanya kesenjangan gender di berbagai bidang	Belum optimalnya implementasi kebijakan PUG di Provinsi maupun daerah
			Belum optimalnya implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Masih terdapat ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik dan ekonomi yang menjadi indikator pembangunan gender
			Belum optimalnya kualitas dan kuantitas data dan informasi pilah gender diberbagai level baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Masih rendahnya proporsi belanja anggaran responsif gender dibanding total pagu di perangkat daerah maupun APBD secara keseluruhan
			Masih rendahnya ketrampilan perempuan di sektor non formal
			Belum adanya layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan terintegrasi di level Kecamatan atau Desa
2	Belum optimalnya implementasi pemenuhan hak anak didaerah	Komitmen pengambil kebijakan didaerah masih kurang	Belum semua stakeholder di Kabupaten/Kota memahami regulasi Kabupaten/Kota Layak Anak
			Implementasi Pengarusutamaan hak anak belum menjadi isu prioritas dan strategis bagi Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha didaerah
			Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan di berbagai level mulai dari desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten/Kota
			Belum adanya sistem pelibatan anak dalam forum pengambilan keputusan secara berjenjang dan integratif
4	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Semakin banyaknya jenis kasus kekerasan dan perundungan perempuan dan anak	Sebagian besar Layanan penanganan kekerasan perempuan dan anak didaerah masih terpusat pada level Kabupaten/Kota

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak lintas sektor di daerah
			Belum optimalnya implementasi sistem perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat didaerah
			Belum optimalnya perlindungan bagi perempuan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan resiko
			Belum optimalnya sinergitas Lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Belum semua Kabupaten/Kota membentuk UPTD PPA
			Masih terbatasnya kapasitas SDM pada lembaga penyedia layanan di daerah
			Belum adanya layanan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu di level Kecamatan/Desa
5	Belum optimalnya implementasi pembangunan kependudukan di daerah	Belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun dan mengintegrasikan GDPK 5 pilar kedalam dokumen perencanaan	Belum optimalnya advokasi dan pendampingan terkait pemanfaatan GDPK 5 pilar di Kabupaten/Kota
			Masih rendahnya komitmen pengambil kebijakan di Kabupaten/ Kota untuk menyusun GDPK 5 pilar serta mengintegrasikan ke dokumen perencanaan
			Belum semua satuan pendidikan jenjang SMA/SMK membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
6	Masih rendahnya Kepesertaan KB Pasangan Usia Subur	Masih rendahnya kepesertaan KB terutama KB MKJP.	Kurangnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat karena keterbatasan jumlah tenaga penyuluh KB (PLKB) dilapangan
			Masih terbatasnya akses dan layanan KB gratis utamanya KB MKJP bagi masyarakat kurang mampu didaerah pedesaan atau terpencil/perbatasan
			Kurangnya motivasi dan kapasitas Kader PPKBD, Sub PPKBD dalam memberikan KIE KB MKJP kepada masyarakat
7	Belum optimalnya peran kelembagaan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendukung peningkatan Ketahanan Keluarga.	Masih kurangnya peran aktif dan kapasitas kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR) dalam membina anggota kelompoknya	Belum optimalnya advokasi dan pendampingan serta peningkatan kapasitas bagi kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR)
8	Belum optimalnya peran kader dan kelompok UPPKA dalam mendorong peningkatan pendapatan keluarga keluarga	Masih rendahnya kapasitas kader dan anggota kelompok UPPKA dalam menciptakan wirausaha mandiri	Masih rendahnya pelatihan ketrampilan ekonomi kader dan anggota UPKKA
			Terbatasnya akses sumber permodalan bagi kader dan anggota

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kelompok UPPKA
			Kualitas produksi dan pemasaran produk hasil anggota UPPKA
9	Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, informasi layanan publik dan keuangan perangkat daerah

2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

2.5.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Permasalahan dan Tantangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di level Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan belum optimal yang menyebabkan capaian kinerja dalam PPE Kabupaten/Kota belum banyak yang dilevel mentor atau utama;
2) Kelompok kerja PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal dalam mendorong, mendampingi dan mengawasi implementasi kebijakan PPRG didaerah yang menyebabkan capaian ARG di level provinsi masih 10-11% dari total pagu;
3) Rendahnya kapasitas, ketrampilan dan akses ekonomi serta pemasaran bagi perempuan wirausaha;
4) Kurangnya kapasitas perempuan di bidang politik serta kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan yang menyebabkan keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah;
5) Kuatnya budaya patriarkhi yang menghambat kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
6) Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di Kabupaten/Kota dalam mendukung pemenuhan indikator KLA;
7) Rendahnya partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan di level desa dan kecamatan;
8) Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kasus KDRT dan bullying;
9) Layanan penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang terintegrasi belum sampai pada level kecamatan;
10) Masih tingginya angka perkawinan usia anak;
11) Penggunaan media sosial dan aplikasi internet dalam interaksi di dunia maya pada masyarakat semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki gawai, sehingga menjadi tantangan

dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan secara online.

12) Masih rendahnya jumlah petugas pendamping hukum atau paralegal di level Kecamatan/desa yang berperspektif gender dan hak anak.

b. Permasalahan dan Tantangan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun pedoman Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar serta mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan;
2) Masih rendahnya keaktifan peran kader tribina (BKR, BKB dan BKL) dalam mendukung ketahanan keluarga;
3) Masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
4) Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan jumlah desa yang didampingi tidak proporsional;
5) Kurangnya kapasitas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif;
6) Masih banyaknya sekolah yang belum mengimplementasikan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK);

2.5.2 Isu Strategis Lingkungan Dinamis

Tabel 2. 19
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pemberdayaan Perempuan	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan	1. Masih tingginya kemiskinan pada kelompok rentan yaitu perempuan, kaum marginal dan difabel 2. Kaum Perempuan merupakan kaum rentan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim	1. Peran perempuan dalam pembangunan khususnya terkait isu lingkungan (perubahan iklim, degradasi lingkungan, krisis air) masih belum optimal 2. *Gender Gap Index* (WEF) menunjukkan kesenjangan cukup tinggi pada dimensi ekonomi dan politik.	Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan lingkungan (modal, pekerjaan layak, keterampilan, air bersih, dll).	Jawa Tengah sebagai wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, kekeringan) menempatkan perempuan sebagai kelompok paling rentan	Belum optimalnya Pembangunan kesetaraan gender, peran perempuan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Urusan Perlindungan Anak	Belum optimalnya implementasi pemenuhan hak anak	Belum meratanya akses pendidikan dan kesehatan yang berpengaruh terhadap kualitas hidup anak	Perubahan iklim, pencemaran, krisis air, degradasi lahan, serta meningkatnya bencana alam membawa dampak serius bagi kualitas hidup anak.	Anak belum sepenuhnya dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan yang ramah anak	Jawa Tengah termasuk Provinsi dengan jumlah dispensasi nikah tertinggi, faktor yang memengaruhi adalah anak putus sekolah/ATS, kemiskinan dan minimnya akses informasi kespro.	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih adanya ketimpangan gender dan rendahnya perlindungan hak-hak anak	Kondisi darurat akibat bencana lingkungan sering kali memicu krisis kemanusiaan (kekerasan, eksploitasi, TPPO dll) yang membuat perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan	Kasus dan korban kekerasan perempuan dan anak semakin tinggi	Kekerasan berbasis gender *online*/KBGO dan *bullying* anak semakin meningkat	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih rendahnya Kepesertaan KB Pasangan Usia Subur	Belum optimalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Rendahnya *Total Fertility Rate (TFR)* pada beberapa negara maju di Dunia, seperti Jepang, Singapura, China.	Bonus demografi bisa menjadi bencana demografi. banyak usia produktif yang menganggur, kualitas rendah, dan berpotensi menambah beban negara, bukan menjadi penggerak pembangunan.	*ASFR*, anemia remaja putri, rendahnya tentang kespro bagi remaja dan stunting menjadi isu utama pembangunan kependudukan	Belum optimalnya pembangunan kependudukan di Provinsi Jawa Tengah
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya peran kelembagaan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendukung	Belum optimalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif	Globalisasi, urbanisasi, dan migrasi internasional membuat banyak keluarga mengalami disrupsi fungsi dan rentan	Perubahan pola hidup, tekanan ekonomi akibat kerusakan lingkungan, serta meningkatnya	Siklus kerentanan keluarga berulang, Ketahanan sosial masyarakat melemah dan capaian	

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	peningkatan Ketahanan Keluarga.		ekonomi terutama pada negara berkembang	risiko bencana berdampak langsung pada stabilitas keluarga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pola asuh anak, pembinaan remaja, dan kualitas kehidupan lansia.	pembangunan keluarga tidak merata	
Program Penunjang urusan Daerah	Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Tata kelola lokal yang kuat, transparan, dan inklusif sangat penting untuk menjawab tantangan lingkungan global—mulai dari adaptasi iklim hingga pembangunan berkelanjutan	Belum optimalnya Teknologi berbasis Aplikasi dalam pengelolaan administasi dan tatakelola organisasi	Belum optimalnya Sarpras dan kapasitas SDM internal	Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah

2.5.3 Potensi Daerah

Adanya peluang/potensi dalam urusan PPPA dan Dalduk KB di Daerah menjadi sumber potensi penting dalam mendorong kinerja PPPA dan Dalduk KB secara berkelanjutan dan sinergis antara pusat dan daerah.

a. Peluang/Potensi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak (Perda PUG, Perda penyelenggaran Perlindungan Perempuan, Perda Perlindungan Anak, Perda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan lainnya);
2) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam Asta Cita Presiden ke-1 dan ke-4.
3) Adanya program *Quick Wins* dari Kementerian PPPA yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI), Perluasan jangkauan layanan SAPA, Satu data Berbasis Desa.
4) Program Aksi Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Kecamatan Berdaya sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

5) Program taktis Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan;
6) Program intervensi Gubernur yang mendukung perlindungan perempuan dan anak yaitu Pembentukan Kecamatan Berdaya dengan mendorong pembentukan rumah perlindungan perempuan, anak dan disabilitas di setiap kecamatan serta bantuan hukum bagi perempuan, anak dan disabilitas;
7) Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
8) Tersedianya kebijakan teknis yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
9) Dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
10) Kerjasama antar Provinsi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
11) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Akademisi se-Jawa Tengah untuk implementasi 136 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;
12) Nota Kesepakatan Gubernur Jawa Tengah dan Pimpinan Aparat Penegak Hukum tingkat Jawa Tengah serta Perjanjian Kerja Sama *(MOU)* antara Kepala OPD PPPA dan Aparat Penegak Hukum dan Peradi terkait akses keadilan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sistem peradilan (SPPT-PKKTP);
13) Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF;
14) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(SDG`s)* Tahun 2015-2030;
15) Adanya kerjasama terkait perlindungan perempuan dan anak dengan unsur *pentahelix*, seperti Kerjasama Gojek dan Grab serta akademisi, organisasi perempuan, pelatihan kader paralegal oleh organisasi keagamaan dan kerjasama lainnya;
16) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Baznas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha berupa *CSR* yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Peluang/Potensi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
2) Adanya program prioritas *Quick Wins* Kemendukbangga yang selaras dengan prioritas daerah yaitu Taman Asuh dan Sayang Anak

(Tamasya), Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (Genting), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Genting), *Supperapps* tentang Keluarga dan Lansia berdaya (Sidaya).

3) Adanya kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah terkait Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar untuk menjadi pedoman di Daerah;
4) Komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung program KKBPK;
5) Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
6) Adanya kebijakan terkait Kampung KB yang menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di Desa/Kelurahan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan pada hakikatnya merupakan hasil akhir yang akan dicapai atas pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan Pembanguan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu ”**Mewujudkan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan”**. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Visi atau tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 adalah “**Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”.**

Sedangkan 6 (enam) Misi Jawa Tengah yaitu 1**.** Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global; 2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan; 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas; 4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif; 5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; 6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Dalam rangka pencapaian sasaran Provinsi Jawa Tengah pada misi ke-5, yaitu Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan dengan **Fokus Kerja ”Jateng Nyaman” melalui transformasi sosial** dengan sasaran **Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan berkarakter melalui indikator Indeks Modal Manusia** yang terjabarkan dalam Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Ibangga) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), maka Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, antara lain :

1. Meningkatkan kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Meningkatkan Keluarga berkualitas;
3. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang berintegritas dan dinamis.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan sasaran jangka menengah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 – 2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang pembangunan;
2. Meningkatnya perlindungan anak;
3. Terkendalinya jumlah penduduk;
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Secara rinci tujuan, sasaran, serta indikator kinerja dan target sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak		IKG (Indeks Ketimpangan Gender)	Angka	0,336	0,308	0,306	0,304	0,301	0,3	0,297	0,296	0,296
		Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,34	-	65	65,35	66,7	66,95	67,2	67,5	67,5
		Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,31	93,44	93,45	93,47	93,49	93,5	93,52	93,55	93,55
2	Meningkatnya Keluarga Berkualitas		IPKK (Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga)	Angka	72,63	74,8	76,1	77,06	77,79	78,37	78,84	79,25	79,25
		Terkendalinya Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,04	2,03	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,07	63,9	64,25	64,5	64,75	65	65,3	65,5	65,5

Tabel 3. 2

Tujuan dan Sasaran serta indikator Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	83,90	87,51	87,6	87,70	87,80	87,90	88	88,10	77,10
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	2,75	2,92	2,93	2,95	2,98	3	3,05	3,08	3,08
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	90,25	88,87	88,9	89	89,10	89,30	89,50	89,80	89,80

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

a. Mendorong implementasi pemberdayaan perempuan pada Kecamatan Berdaya di Kabupaten/Kota;
b. Menguatkan implementasi PUG di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan;
c. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO melalui Rumah Perlindungan Perempuan,Anak dan disabilitas di setiap Kecamatan;
d. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan perempuan, anak, disabilitas melalui bantuan hukum bagi disabilitas, perempuan dan anak dengan lokus Kecamatan;
e. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor;
f. Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan, ketahanan keluarga serta mendorong peran serta lembaga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
g. Mendorong penyusunan dokumen GDPK 5 pilar didaerah serta mendorong integrasinya kedalam dokumen perencanaan
h. Peningkatan akses, komunikasi, informasi dan edukasi tentang KB
i. Peningkatan Akses terhadap Layanan Dasar Keluarga.
j. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan melalui perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, pengelolaan SDM dan keuangan yang profesional, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala.

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman yang ditetapkan dalam melakukan setiap ativitas dan kegiatan yang akan dilakukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan pengarusutamaan dan pembangunan gender serta pemberdayaan perempuan;
b. Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dan anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan;
c. Peningkatan layanan penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan;
d. Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor dan level;
e. Meningkatkan ketahanan keluarga
f. Penguatan komitmen dan advokasi implementasi GDPK 5 Pilar di Kabupaten/Kota
g. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
h. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
i. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
j. Peningkatan kapasitas PPKBD dalam rangka mendukung peran dan fungsi Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
k. Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah;
l. Peningkatan kapasitas Kader Satyagatra di Kecamatan;
m. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja di Kecamatan;
n. Penerapan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh dan berkelanjutan;
o. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan berbasis resiko;
p. Mendorong pelaksanaan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan dan dinamis.

Penerapan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan, sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan RPJMD : Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan			
Sasaran RPJMD : Terwujudnya Sumber Daya Manusia berdaya saing dan berkarakter			
Tujuan/Sasaran	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang pembangunan	1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui penyediaan kesempatan yang setara terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan atas sumber daya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi; 2. Penguatan Tata Kelola dan Regulasi PUG; 3. Peningkatan Partisipasi Perempuan di segala bidang; 4. Peningkatan kualitas data terpilah gender; 5. Penguatan kolaborasi multipihak dan sektor; 6. Pemantauan dan evaluasi kinerja PUG di daerah; 7. Mendorong peningkatan peran dan kapasitas perempuan dan anak di level Desa	1. Meningkatkan pembangunan berbasis gender 2. Meningkatkan ketahanan keluarga 3. Mendorong implementasi Kecamatan Berdaya sebagai upaya sinergisitas untuk pemberdayaan ekonomi perempuan didaerah 4. Perluasan penyelenggaraan upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan 5. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di OPD melalui pembentukan Pokja PUG aktif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 6. Integrasi Gender *Equality Goals* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, KUA-PPAS). 7. Afirmasi keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis di pemerintahan, legislatif, dan organisasi masyarakat. 8. Peningkatan ketersediaan data pilah gender dan anak provinsi dan kab/kota; 9. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

Tujuan RPJMD : Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan			
Sasaran RPJMD : Terwujudnya Sumber Daya Manusia berdaya saing dan berkarakter			
Tujuan/Sasaran	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	Meningkatnya Perlindungan perempuan dan Anak	1. Mendorong implementasi kebijakan undang-undang TPKS, Perda, Pergub maupun kebijakan perlindungan perempuan dan anak ditingkat Kab/Kota; 2. Meningkatkan kerjasama baik stakeholder baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah ditingkat pusat, provinsi, Kab/Kota maupun antar provinsi untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak; 3. Mendorong sinergisitas program dan kegiatan antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4. Peningkatan Kapasitas SDM tenaga pada lembaga penyedia layanan; 5. Mendorong Komunikasi, Infomasi dan Edukasi tentang perlindungan anak; 6. Peningkatan Layanan Perlindungan Khusus Anak 7. Penguatan data dan sistem informasi pencatatan kekerasan perempuan dan anak 8. Penguatan peran Bunda Forum Anak dalam mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak	1. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak 2. Mendorong Pembentukan dan optimalisasi fungsi rumah perlindungan anak Kecamatan di Kabupaten/Kota 3. Integrasi isu perlindungan perempuan anak dalam dokumen perencanaan dan kebijakan sektoral lainnya 4. Mendorong Kabupaten/Kota dalam pembentukan dan penguatan Forum Anak tingkat Kecamatan. 5. Mendorong Kabupaten/Kota dalam pembentukan Unit Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). 6. Pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor 7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Kab/Kota Layak Anak (KLA) 8. Pelatihan kader paralegal di tingkat kecamatan untuk mendorong implementasi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tujuan RPJMD : Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan			
Sasaran RPJMD : Terwujudnya Sumber Daya Manusia berdaya saing dan berkarakter			
Tujuan/Sasaran	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Keluarga berkualitas	1. Terkendalinya jumlah penduduk 2. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1. Mendorong penyusunan dokumen GDPK 5 pilar didaerah serta mendorong integrasinya kedalam dokumen perencanaan 2. Peningkatan akses, komunikasi, informasi dan edukasi tentang KB 3. Peningkatan Ketahanan ekonomi Keluarga; 4. Penguatan Ketahanan Anak dan Remaja; 5. Peningkatan Akses terhadap Layanan Dasar Keluarga.	1. Meningkatkan ketahanan keluarga 2. Penguatan komitmen dan advokasi implementasi GDPK 5 Pilar di Kabupaten/Kota 3. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 4. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 5. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 6. Peningkatan kapasitas PPKBD dalam rangka mendukung peran dan fungsi Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 7. Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah; 8. Peningkatan kapasitas Kader Satyagatra di Kecamatan; 9. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja di Kecamatan.
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan melalui perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, pengelolaan SDM dan keuangan yang profesional, pemenuhan kebutuhan sarana	1. Penerapan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh dan berkelanjutan;

Tujuan RPJMD : Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan			
Sasaran RPJMD : Terwujudnya Sumber Daya Manusia berdaya saing dan berkarakter			
Tujuan/Sasaran	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	dan prasarana yang mendukung kinerja, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala	2. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan berbasis resiko; 3. Mendorong pelaksanaan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan dan dinamis.

3.2.3 Tahapan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah

a. Tahun 2026 merupakan tahap "Penguatan Landasan Pembangunan Daerah" dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun ke depan. Tahun pertama ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional".
b. Tahun 2027 merupakan tahap "Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah" dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahun kedua ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu "Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi".
c. Tahun 2028 merupakan tahap "Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah" dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahun ketiga ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu "Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau".
d. Tahun 2029 merupakan tahap "Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah" dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahun keempat ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu "Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan".
e. Tahun 2030 merupakan tahap terakhir dari perencanaan jangka menengah daerah yang diarahkan pada "Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan" dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Tabel 3. 4
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Peningkatan akses informasi dan edukasi tentang disiplin positif dan parenting bagi keluarga 2. Peningkatan kualitas hidup anak dan remaja melalui pemberian akses informasi, edukasi, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga 3. Peningkatan Penyadaran pentingnya perkawinan minimal di usia 19 tahun serta edukasi kepada calon pengantin	1. Memperluas sasaran KIE tentang disiplin positif dilingkungan pondok pesantren 2. Peningkatan kualitas layanan konsultasi keluarga 3. Peningkatan edukasi bagi catin 4. Peningkatan kapasitas kader dalam mendorong	1. Mendorong peningkatan SDM penyedia layanan konsultasi Keluarga yang responsif gender dan hak anak 2. Perluasan komitmen dan kerjasama lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas 3. Perluasan sasaran program KIE bagi anak, remaja dan	1. Mendorong peningkatan SDM penyedia layanan konsultasi Keluarga yang responsif gender dan hak anak 2. Perluasan komitmen dan kerjasama lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas 3. Perluasan sasaran program KIE bagi anak, remaja dan keluarga dalam mendukung	1. Mendorong peningkatan SDM penyedia layanan konsultasi Keluarga yang responsif gender dan hak anak 2. Perluasan komitmen dan kerjasama lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas 3. Perluasan sasaran program KIE bagi anak, remaja dan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
4. Perluasan KIE tentang kespro bagi remaja dan konselor sebaya 5. Pelibatan *hexahelix* dalam mewujudkan ketahanan keluarga 6. Mendorong peran kader Satyagatra untuk meningkatkan kualitas keluarga 7. Perluasan layanan konsultasi keluarga di daerah 8. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja	ketahanan keluarga 5. Peningkatan kapasitas konselor sebaya dalam rangka KIE Kespro 6. Peningkatan komitmen daerah melalui kebijakan ketahanan keluarga 7. Mendorong peran kader Satyagatra untuk meningkatkan kualitas keluarga 8. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja	keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga 4. Mendorong peran kader Satyagatra untuk meningkatkan kualitas keluarga 5. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja	ketahanan keluarga 4. Mendorong peran kader Satyagatra untuk meningkatkan kualitas keluarga 5. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja	keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga 4. Mendorong peran kader Satyagatra untuk meningkatkan kualitas keluarga 5. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja
1. Penguatan kelembagaan PUG Provinsi maupun Kabupaten/Kota 2. Peningkatan pemahaman SDM perencana dan penganggaran pada OPD Provinsi dan Kabupaten/kota 3. Peningkatan kualitas belanja ARG 4. Peningkatan kewirausahaan Perempuan 5. Peningkatan pemahaman SDM pengelola data pilah gender dan anak Provinsi dan Kabupaten/kota 6. Mendorong komitmen Kabupaten/Kota dalam implementasi Kecamatan Berdaya	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG Provinsi maupun Kabupaten/ Kota 2. Peningkatan Kapasitas SDM perencana dan penganggaran pada OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota 3. Peningkatan kualitas belanja ARG 4. Peningkatan kewirausahaan Perempuan 5. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data pilah gender dan anak Provinsi dan Kabupaten/ Kota 6. Perluasan dorongan komitmen Kabupaten/	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG Provinsi maupun Kabupaten/ Kota 2. Peningkatan Kapasitas SDM perencana dan penganggaran pada OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota 3. Peningkatan kualitas belanja ARG 4. Peningkatan keWirausahaan Perempuan 5. Peningkatan Kolaborasi dalam upaya pemberdayaan ekoonomi perempuan 6. Peningkatan kuantitas data pilah gender dan anak Provinsi dan Kabupaten/ kota	1. Peningkatan kualitas kelembagaan PUG Provinsi maupun Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kapasitas SDM perencana dan penganggaran pada OPD Provinsi dan Kabupaten/kota 3. Peningkatan kualitas belanja ARG 4. Peningkatan keWirausahaan Perempuan 5. Peningkatan Kolaborasi dalam upaya pemberdayaan ekoonomi perempuan 6. Peningkatan kuantitas data pilah gender dan anak Provinsi dan Kabupaten/kota 7. Perluasan dorongan komitmen	1. Peningkatan kelembagaan PUG Provinsi maupun Kabupaten/ Kota 2. Peningkatan Kapasitas SDM perencana dan penganggaran pada OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota 3. Peningkatan kualitas belanja ARG Provinsi dan Kabupaten/ Kota 4. Peningkatan kewirausahaan Perempuan 5. Peningkatan Kolaborasi dalam upaya pemberdayaan ekoonomi perempuan 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas data pilah gender dan anak

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	Kota dalam implementasi Kecamatan Berdaya	7. Perluasan dorongan komitmen Kabupaten/ Kota dalam implementasi Kecamatan Berdaya	Kabupaten/Kota dalam implementasi Kecamatan Berdaya	Provinsi dan Kabupaten/ kota 7. Perluasan dorongan komitmen Kabupaten/ Kota dalam implementasi Kecamatan Berdaya
1. Peningkatan pelembagaan PHA di daerah 2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan di daerah terkait penyelenggaraan KLA 3. Peningkatan partisipasi anak dalam proses perencanaan di level Kabupaten/Kota 4. Peningkatan kapasitas forum anak Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak di Kecamatan Berdaya 6. Penguatan Peran Bunda Forum anak untuk PHA dan Perlindungan Anak	1. Peningkatan pelembagaan PHA di daerah 2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan di daerah terkait penyelenggaraan KLA 3. Peningkatan partisipasi anak dalam proses perencanaan di level kabupaten/ Kota 4. Peningkatan kapasitas forum anak Provinsi dan Kabupaten/ Kota 5. Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak di Kecamatan Berdaya 6. Penguatan Peran Bunda Forum anak	1. Peningkatan kualitas kelembagaan PHA lintas sektor di daerah 2. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di daerah 3. Peningkatan partisipasi anak dalam perencanaan di level kabupaten/ Kota dan kecamatan 4. Peningkatan kapasitas forum anak Provinsi dan Kabupaten/ Kota 5. Pengembangan Forum Anak di Kecamatan Berdaya 6. Penguatan Peran Bunda Forum Anak	1. Peningkatan kualitas kelembagaan PHA lintas sektor di daerah 2. Peningkatan kualitas implementasi KLA didaerah 3. Peningkatan partisipasi anak dalam proses perencanaan di level kabupaten/Kota dan kecamatan 4. Peningkatan kapasitas forum anak Provinsi dan Kabupaten/Kota dan desa 5. Pengembangan Forum Anak di Kecamatan Berdaya 6. Penguatan Peran Bunda Forum anak untuk PHA dan Perlindungan Anak	1. Peningkatan kualitas kelembagaan PHA lintas sektor di daerah 2. Peningkatan kualitas implementasi KLA didaerah 3. Peningkatan partisipasi anak dalam proses perencanaan di level kabupaten/ Kota dan Kecamatan 4. Peningkatan kapasitas forum anak Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan desa 5. Pengembangan Forum Anak di Kecamatan Berdaya 6. Penguatan Peran Bunda Forum Anak
1. Peningkatan pembentukan UPTD PPA Di Kabupaten/Kota 2. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan untuk KTP/A dan TPPO di Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun RPPA di Kecamatan 3. Peningkatan komitmen	1. Peningkatan peran UPTD PPA di Kabupaten/ Kota 2. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan termasuk bantuan hukum untuk KTP/A dan TPPO di	1. Optimalisasi peran dan fungsi UPTD PPA Di Kabupaten/ Kota dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak 2. Peningkatan kualitas SDM lembaga penyedia	1. Optimalisasi peran dan fungsi UPTD PPA Di Kabupaten/Kota dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak 2. Peningkatan kualitas SDM lembaga penyedia	1. Optimalisasi peran dan fungsi UPTD PPA Di Kabupaten/ Kota dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak 2. Peningkatan kualitas SDM lembaga

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
pembentukan kecamatan berdaya 4. Peningkatan komitmen pembentukan rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan 5. Penguatan jejaring kelembagaan pelayanan terpadu di Provinsi dan Kabupaten/Kota 6. Pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor 7. Pendidikan anti kekerasan serta *bullying* sejak dini 8. Perluasan sekolah dan pondok pesantren ramah anak 9. Peningkatan perlindungan 15 AMPK di Daerah 10. Peningkatan KIE pencegahan KTPA dan TPPO.	Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta RPPA Kecamatan 3. Perluasan lokus kecamatan berdaya di Kabupaten/ Kota 4. Optimalisasi rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan 5. Penguatan jejaring kelembagaan pelayanan terpadu di Provinsi dan Kabupaten/ Kota 6. Pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor 7. Pendidikan anti kekerasan serta bullying sejak dini 8. Perluasan sekolah dan pondok pesantren ramah anak 9. Peningkatan perlindungan 15 AMPK di Daerah 10. Peningkatan KIE pencegahan KTPA dan TPPO	layanan termasuk bantuan hukum untuk KTP/A dan TPPO di Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta RPPA Kecamatan 3. Perluasan lokus kecamatan berdaya di Kabupaten/Kota 4. Optimalisasi rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan 5. Peningkatan komitmen jejaring kelembagaan pelayanan terpadu di Provinsi dan Kabupaten/ Kota 6. Penurunan perkawinan anak melalui komitmen lintas sektor 7. Pendidikan anti kekerasan dan bullying dilingkungan pendidikan 8. Perluasan sekolah dan pondok pesantren ramah anak 9. Peningkatan perlindungan 15 AMPK di Daerah 10. Peningkatan KIE pencegahan KTPA dan TPPO	layanan untuk KTP/A dan TPPO di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta RPPA Kecamatan 3. Optimalisasi peran kecamatan berdaya di Kabupaten/Kota 4. Optimalisasi peran rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan 5. Peningkatan komitmen jejaring kelembagaan pelayanan terpadu di Provinsi dan Kabupaten/Kota 6. Penurunan perkawinan anak melalui komitmen lintas sektor 7. Pendidikan anti kekerasan dan bullying dilingkungan pendidikan 8. Perluasan sekolah dan pondok pesantren ramah anak 9. Peningkatan perlindungan 15 AMPK di Daerah 10. Peningkatan KIE pencegahan KTPA dan TPPO	penyedia layanan untuk KTP/A dan TPPO di Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta RPPA Kecamatan 3. Optimalisasi peran kecamatan berdaya di Kabupaten/ Kota 4. Optimalisasi peran rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan 5. Peningkatan komitmen jejaring kelembagaan pelayanan terpadu di Provinsi dan Kabupaten/ Kota 6. Penurunan perkawinan anak melalui komitmen lintas sektor 7. Pendidikan anti kekerasan dan bullying dilingkungan pendidikan 8. Perluasan sekolah dan pondok pesantren ramah anak 9. Peningkatan perlindungan 15 AMPK di Daerah 10. Peningkatan KIE pencegahan KTPA dan TPPO
1. Peningkatan kesertaan KB bagi PUS terutama KB MKJP	1. Peningkatan kesertaan KB bagi PUS	1. Peningkatan kesertaan KB bagi PUS	1. Peningkatan kesertaan KB bagi PUS	1. Peningkatan kesertaan KB bagi PUS

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
2. Mendorong peningkatan peran jejaring mitra dalam upaya penggerakan dan advokasi KIE Program Bangga Kencana 3. Mendorong penurunan *Unmeetneed* KB 4. Mendorong peningkatan Kampung KB mandiri dan berkelanjutan 5. Mendorong Kabupaten/Kota dalam penyusunan GDPK 5 pilar serta mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan 6. Meningkatkan kapasitas kader Tribina dalam mendorong ketahanan keluarga 7. Meningkatkan kapasitas kader uppka dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga 8. Sosialisasi SSK di Kabupaten/Kota	terutama KB MKJP 2. Mendorong peningkatan peran jejaring mitra dalam upaya penggerakan dan advokasi KIE Program Bangga Kencana 3. Mendorong penurunan *Unmeetneed* KB 4. Mendorong peningkatan Kampung KB mandiri dan berkelanjutan 5. Mendorong Kabupaten/ Kota dalam penyusunan GDPK 5 pilar serta mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan 6. Meningkatkan kapasitas kader Tribina dalam mendorong ketahanan keluarga 7. Meningkatkan kapasitas kader uppka dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga 8. Sosialisasi SSK di Kabupaten/ Kota	terutama KB MKJP 2. Mendorong peningkatan peran jejaring mitra dalam upaya penggerakan dan advokasi KIE Program Bangga Kencana 3. Mendorong penurunan *Unmeetneed* KB 4. Mendorong implementasi Kampung KB mandiri dan berkelanjutan sinergis dengan DRPPA 5. Mendorong Kabupaten/ Kota dalam penyusunan GDPK 5 pilar serta mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan 6. Meningkatkan kapasitas kader Tribina dalam mendorong ketahanan keluarga 7. Meningkatkan kemandirian uppka dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga 8. Perluasan lokus SSK di Kabupaten/ Kota	terutama KB MKJP 2. Mendorong peningkatan peran jejaring mitra dalam upaya penggerakan dan advokasi KIE Program Bangga Kencana 3. 3. Mendorong penurunan *Unmeetneed* KB 4. Mendorong implementasi Kampung KB mandiri dan berkelanjutan sinergis dengan DRPPA 5. Mendorong integrasi GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan 6. Meningkatkan kapasitas kader Tribina dalam mendorong ketahanan keluarga 7. Meningkatkan kemandirian kelompok uppka dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga 8. Perluasan lokus SSK di Kabupaten/Kota	terutama KB MKJP 2. Mendorong peningkatan peran jejaring mitra dalam upaya penggerakan dan advokasi KIE Program Bangga Kencana 3. Mendorong penurunan *Unmeetneed* KB 4. Mendorong implementasi Kampung KB mandiri dan berkelanjutan sinergis dengan DRPPA 5. Mendorong integrasi GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan 6. Meningkatkan kapasitas kader Tribina dalam mendorong ketahanan keluarga 7. Meningkatkan kemandirian kelompok uppka dalam mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga 8. Perluasan lokus SSK di Kabupaten/ Kota

3.3 Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Manajemen risiko pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/ organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengembangan

budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Pengelolaan risiko strategis perangkat daerah ini bertujuan mengendalikan risiko – risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Manajemen Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3. 5
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Terhadap Risiko Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Adanya Subordinasi dan ketimpangan gender terhadap perempuan	16	Pemahaman masyarakat dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender masih parsial	Terjadinya ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Pihak terdampak adalah keluarga	- Implementasi Perda PUG secara komprehensif di berbagai sektor - Advokasi kebijakan kepada Kab/Kota untuk optimalisasi implementasi regulasi terkait Pengarustamaan Gender - Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan	Kepala Dinas	2025 -2029
Meningkatkan keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurun	12	Ekonomi keluarga yang rendah menjadikan keluarga tersebut rentan	Menghambat kemajuan dan peningkatan kualitas keluarga. Pihak	- Memberikan Layanan Edukasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Penjangkauan Penguatan Keluarga	Kepala Dinas	2025 -2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				perceraian, kekerasan dan permasalahan keluarga	yang terkena Keluarga	- Pelaksanaan Layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) - Sosialisasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok Kegiatan (Tribina) di Kampung Keluarga Berkualitas - Optimalisasi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Berdaya		
Sasaran								
Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	12	Kapasitas dan ketrampilan perempuan masih rendah	Perempuan belum banyak memberikan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Pihak yang terkena Perempuan	- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender - Optimalisasi implementasi pemberdayaan ekonomi dalam Kecamatan Berdaya	Kepala Dinas	2025 -2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- Sinergi antar OPD dan lintas sektor terkait dalam Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi dalam pelatihan, produksi termasuk kemudahan akses modal		
Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	Kekerasan Anak masih banyak terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	16	Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap anak yang sudah ada tetapi belum terimplentasikan secara optimal oleh stakeholder terkait	Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak. Pihak yang terkena Anak	- Implementasi Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap Anak secara komprehensif - Advokasi Penyusunan Regulasi Pencegahan dan Pelayanan Kekerasan terhadap Anak di Kab/kota - Kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan dan	Kepala Dinas	2025 -2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						keluarga dalam upaya mendukung lingkungan yang kondusif - Optimalisasi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Berdaya		
Terkendalinya jumlah penduduk	*Total Fertility Rate (TFR)*	Peningkatan jumlah kelahiran PUS yang signifikan	9	Kurangnya sosialisasi dan KIE kepada masyarakat tentang pentingnya membatasi kelahiran dan mengatur jarak kelahiran	Menurunnya kesejahteraan keluarga dan kelompok masyarakat rentan miskin bertambah. Pihak yang terkena masyarakat dan keluarga	- Sosialisasi dan KIE terkait manfaat KB bagi masyarakat - Kespro bagi remaja dan catin - Optimalisasi RPPA di Kecamatan Berdaya	Kepala Dinas	2025 -2029
Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Meningkatnya angka kasus Perkawinan Anak	8	Faktor Ekonomi Keluarga yang tidak mampu membiayai anak ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga menikahkan anak pada usia muda menjadi	Meningkatnya kasus kekerasan dalam keluarga dan angka perceraian, karena belum stabilnya mental anak untuk	- Advokasi Sekolah Siaga Kependudukan bagi siswa - Optimalisasi RPPA di Kecamatan Berdaya melalui fungsi kader Satyagatra.	Kepala Dinas	2025 -2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				salah satu jalan untuk mengurangi tanggungan keluarga	berkeluarga. Pihak yang terkena Anak dan Keluarga			
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Indeks Manajemen Risiko	Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/ Penyedia	12	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.	- Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi di tingkat OPD - Pengawasan proses pengadaan barang/jasa	Sekretaris	Semester 1-2 Tahun 2026
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Indeks Kepuasan Masyarakat	Capaian kinerja tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	4	Belum semua penyelenggara layanan mengimplementasikan standar layanan yang telah ditetapkan	Persentase tingkat kepuasan pengguna layanan menurun	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Pelayanan Informasi	Sekretaris	Semester 1-2 Tahun 2026

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

a. Kegiataan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi.
   1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
   2) Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
   3) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi
b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Ormas kewenangan Provinsi
   1) Sub Kegiatan Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
   2) Sub Kegiatan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
   3) Sub Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi

4.1.2 Program Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

   Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya lintas daerah Kab/Kota

   Sub Kegiatan layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4.1.3 Program Pemenuhan Hak Anak

a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

   Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi
b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
   1) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi

3) Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

4.1.4 Program Perlindungan Perempuan

a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
   2) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
   3) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
   1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
   2) Sub Kegiatan penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   3) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

4.1.5 Program Perlindungan Khusus Anak

a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
   1) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
   2) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
   3) Sub Kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
   4) Sub Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
b. Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi
   1) Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi
   2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
   3) Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

4.1.6 Program Pengendalian Penduduk

a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
   1) Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi GDPK
   2) Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
   3) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
   4) Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain
b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi

   Sub Kegiatan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

4.1.7 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

a. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
   1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
   2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana
   3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja
b. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

   Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

4.1.8 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

a. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
   2) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
   3) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
b. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   1) Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
   2) Sub Kegiatan Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
   3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

4.1.9 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
   4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
   6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   8) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   9) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
4) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 4. 1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak *										3.595.441.000		3.745.000.000		3.972.000.000		7.460.000.000		7.825.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Ketimpangan Gender (IKG) *	Angka	0,308	0,304		0,301		0,3		0,297		0,296		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang pembangunan **									2.576.140.000		2.692.000.000		2.876.000.000		5.130.000.000		5.261.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Pembangunan Gender (IPG) **	Angka	93,44	93,47	2.576.140.000	93,49	2.692.000.000	93,5	2.876.000.000	93,52	5.130.000.000	93,55	5.261.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ***								1.085.000.000		1.140.000.000		1.256.000.000		2.310.000.000		2.360.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi ***	%	10,37	12	45.000.000	13	50.000.000	14	56.000.000	15	490.000.000	16	510.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi ****							45.000.000		50.000.000		56.000.000		490.000.000		510.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Tersedianya hasil evaluasi penyelenggaraan PUG di Provinsi	Nilai Evaluasi PUG Provinsi ****	Nilai	901	900	45.000.000	900	50.000.000	900	56.000.000	900	490.000.000	900	510.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	
				Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi *****						12.000.000		14.000.000		16.000.000		140.000.000		150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek *****	Orang	80	50	12.000.000	70	14.000.000	80	16.000.000	90	140.000.000	100	150.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	JAWA TENGAH
				Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi *****						16.000.000		17.000.000		20.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan *****	Lembaga	10	5	16.000.000	5	17.000.000	5	20.000.000	5	150.000.000	5	160.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	JAWA TENGAH
				Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi *****						17.000.000		19.000.000		20.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) *****	Lembaga	50	50	17.000.000	50	19.000.000	50	20.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	JAWA TENGAH
					Meningkatnya Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha ***	%	80	80	1.040.000.000	90	1.090.000.000	90	1.200.000.000	90	1.820.000.000	90	1.850.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi ****							1.040.000.000		1.090.000.000		1.200.000.000		1.820.000.000		1.850.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya kapasitas perempuan dalam kelembagaan diberbagai bidang pembangunan	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya ****	%	N/A	40	1.040.000.000	60	1.090.000.000	80	1.200.000.000	100	1.820.000.000	100	1.850.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	
				Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi *****						40.000.000		40.000.000		50.000.000		120.000.000		150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi *****	Lembaga	6	3	40.000.000	4	40.000.000	4	50.000.000	5	120.000.000	6	150.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	JAWA TENGAH
				sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi *****						200.000.000		200.000.000		250.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi *****	Orang	N/A	35	200.000.000	35	200.000.000	35	250.000.000	35	500.000.000	35	500.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	JAWA TENGAH
				peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi *****						800.000.000		850.000.000		900.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan *****	Orang	N/A	80	800.000.000	80	850.000.000	80	900.000.000	80	1.200.000.000	80	1.200.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN ***								1.306.000.000		1.352.000.000		1.408.000.000		2.410.000.000		2.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan ***	%	14	85	1.306.000.000	95	1.352.000.000	100	1.408.000.000	100	2.410.000.000	100	2.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							94.000.000		102.000.000		108.000.000		310.000.000		400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya kab/kota yang mengimplementasikan rumah perlindungan perempuan di kecamatan	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan ****	%	N/A	25	94.000.000	30	102.000.000	35	108.000.000	50	310.000.000	60	400.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	
				Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi *****						47.000.000		50.000.000		52.000.000		120.000.000		150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	N/A	1	47.000.000	1	50.000.000	1	52.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	JAWA TENGAH
				Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi *****						37.000.000		40.000.000		42.000.000		110.000.000		150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi *****	Orang	N/A	35	37.000.000	35	40.000.000	35	42.000.000	35	110.000.000	35	150.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi *****						10.000.000		12.000.000		14.000.000		80.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi,	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota *****	Kegiatan	35	35	10.000.000	35	12.000.000	35	14.000.000	35	80.000.000	35	100.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					masyarakat, serta Kab/Kota															
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi ****							1.212.000.000		1.250.000.000		1.300.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya jumlah lembaga penyedia layanan di Kabupaten/Kota yang terstandarisasi	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi ****	Unit	N/A	15	1.212.000.000	20	1.250.000.000	25	1.300.000.000	30	2.100.000.000	35	2.100.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi *****						322.000.000		330.000.000		350.000.000		650.000.000		650.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek *****	Orang	10	15	322.000.000	15	330.000.000	20	350.000.000	20	650.000.000	20	650.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	JAWA TENGAH
				Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						780.000.000		800.000.000		820.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan *****	Dokumen	5	5	780.000.000	5	800.000.000	5	820.000.000	5	1.200.000.000	5	1.200.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	JAWA TENGAH
				Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi *****						110.000.000		120.000.000		130.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) *****	Lembaga	N/A	5	110.000.000	5	120.000.000	5	130.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	JAWA TENGAH
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN ***								152.140.000		166.000.000		177.000.000		310.000.000		281.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Meningkatnya pelayanan korban kekerasan perempuan secara komprehensif	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif ***	%	100	100	152.140.000	100	166.000.000	100	177.000.000	100	310.000.000	100	281.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							152.140.000		166.000.000		177.000.000		310.000.000		281.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlayaninya korban kekerasan perempuan yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan ****	%	100	100	152.140.000	100	166.000.000	100	177.000.000	100	310.000.000	100	281.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
				Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****					17.140.000		19.000.000		20.000.000		35.000.000		36.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	11	17.140.000	12	19.000.000	13	20.000.000	14	35.000.000	15	36.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****					15.000.000		17.000.000		18.000.000		25.000.000		26.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	11	15.000.000	12	17.000.000	13	18.000.000	14	25.000.000	15	26.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						75.000.000		78.000.000		83.000.000		120.000.000		85.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	25	75.000.000	30	78.000.000	30	83.000.000	30	120.000.000	30	85.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH
				layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						10.000.000		12.000.000		13.000.000		30.000.000		31.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	1	10.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	30.000.000	1	31.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						15.000.000		16.000.000		17.000.000		25.000.000		26.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	20	15.000.000	20	16.000.000	20	17.000.000	20	25.000.000	20	26.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Kabupaten/Kota															
				layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						10.000.000		12.000.000		13.000.000		35.000.000		36.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	8	10.000.000	9	12.000.000	10	13.000.000	11	35.000.000	12	36.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						10.000.000		12.000.000		13.000.000		40.000.000		41.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	1	10.000.000	2	12.000.000	2	13.000.000	2	40.000.000	2	41.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA ***								33.000.000		34.000.000		35.000.000		100.000.000		120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya komitmen Kabupaten/Kota dalam pembangunan ketahanan keluarga	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga ***	%	10	20	33.000.000	25	34.000.000	30	35.000.000	35	100.000.000	40	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi ****							33.000.000		34.000.000		35.000.000		100.000.000		120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Meningkatnya kualitas pembangunan ketahanan keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga ****	%	14	20	33.000.000	25	34.000.000	30	35.000.000	35	100.000.000	40	120.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	
				Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota *****						33.000.000		34.000.000		35.000.000		100.000.000		120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota *****	Lembaga	10	10	33.000.000	10	34.000.000	10	35.000.000	10	100.000.000	10	120.000.000	Pokja Kesetaraan Gender	JAWA TENGAH
	Meningkatnya Perlindungan Anak **									1.019.301.000		1.053.000.000		1.096.000.000		2.330.000.000		2.563.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Perlindungan Anak (IPA) **	Angka	N/A	65,35	1.019.301.000	66,7	1.053.000.000	66,95	1.096.000.000	67,2	2.330.000.000	67,5	2.563.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA ***								61.000.000		63.000.000		65.000.000		220.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya kualitas lembaga Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak di Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih ***	%	4,25	24	61.000.000	34	63.000.000	44	65.000.000	54	220.000.000	64	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							61.000.000		63.000.000		65.000.000		220.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya ketersediaan Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak ****	%	100	100	61.000.000	100	63.000.000	100	65.000.000	100	220.000.000	100	250.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	
				layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						61.000.000		63.000.000		65.000.000		220.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	20	20	61.000.000	20	63.000.000	20	65.000.000	20	220.000.000	20	250.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA), Jawa Tengah
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) ***								601.301.000		606.000.000		611.000.000		1.015.000.000		1.070.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak ***	Angka	60,76	61,5	601.301.000	62	606.000.000	62,5	611.000.000	63	1.015.000.000	63,5	1.070.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi ****							575.000.000		575.000.000		575.000.000		800.000.000		800.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya predikat KLA kab/kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan predikat KLA minimal Madya ****	Kabupaten/ Kota	29	30	575.000.000	31	575.000.000	32	575.000.000	33	800.000.000	34	800.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	
				Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi *****						575.000.000		575.000.000		575.000.000		800.000.000		800.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi *****	Lembaga	N/A	20	575.000.000	20	575.000.000	20	575.000.000	20	800.000.000	20	800.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - JAWA TENGAH
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi ****							26.301.000		31.000.000		36.000.000		215.000.000		270.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya jumlah lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak yang mendapat KIE Layanan Ramah Anak	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak ****	Lembaga	35	35	26.301.000	35	31.000.000	35	36.000.000	35	215.000.000	35	270.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak *****						7.000.000		10.000.000		12.000.000		80.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terselenggaraan ya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak *****	Kegiatan	1	3	7.000.000	3	10.000.000	3	12.000.000	3	80.000.000	3	100.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - JAWA TENGAH
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi *****						7.301.000		8.000.000		9.000.000		50.000.000		70.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi *****	Dokumen	1	1	7.301.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
				pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi *****						12.000.000		13.000.000		15.000.000		85.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan *****	Lembaga	N/A	10	12.000.000	10	13.000.000	10	15.000.000	10	85.000.000	10	100.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - JAWA TENGAH
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK ***								207.000.000		226.000.000		253.000.000		825.000.000		945.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) ***	Angka	77,86	79	207.000.000	79,4	226.000.000	79,9	253.000.000	80,5	825.000.000	81	945.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							71.000.000		81.000.000		92.000.000		125.000.000		155.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan rumah perlindungan anak di kecamatan	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak ****	%	N/A	25	71.000.000	30	81.000.000	35	92.000.000	50	125.000.000	60	155.000.000	Pokja Perlindungan Anak	
				Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi *****						10.000.000		13.000.000		17.000.000		20.000.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi *****	Orang	N/A	35	10.000.000	35	13.000.000	35	17.000.000	35	20.000.000	35	30.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi *****						10.000.000		13.000.000		15.000.000		25.000.000		35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota *****	Lembaga	N/A	35	10.000.000	35	13.000.000	35	15.000.000	35	25.000.000	35	35.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
				Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi *****						41.000.000		43.000.000		45.000.000		55.000.000		60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	N/A	1	41.000.000	1	43.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
				monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi *****						10.000.000		12.000.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi *****	Laporan	N/A	1	10.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							136.000.000		145.000.000		161.000.000		700.000.000		790.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Meningkatnya kapasitas lembaga layanan perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang difasilitasi dan dikuatkan	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya ****	Lembaga	10	50	136.000.000	50	145.000.000	50	161.000.000	50	700.000.000	50	790.000.000	Pokja Perlindungan Anak	
				pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi *****						110.000.000		115.000.000		125.000.000		250.000.000		270.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus *****	Lembaga	N/A	3	110.000.000	3	115.000.000	3	125.000.000	3	250.000.000	3	270.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - JAWA TENGAH
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi *****						15.000.000		17.000.000		20.000.000		250.000.000		270.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus *****	Orang	260	25	15.000.000	25	17.000.000	25	20.000.000	25	250.000.000	25	270.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - JAWA TENGAH
				Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi *****						11.000.000		13.000.000		16.000.000		200.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) *****	Lembaga	N/A	3	11.000.000	3	13.000.000	3	16.000.000	3	200.000.000	3	250.000.000	Pokja Perlindungan Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - JAWA TENGAH
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK ***								150.000.000		158.000.000		167.000.000		270.000.000		298.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Meningkatnya pelayanan korban kekerasan anak secara komprehensif	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif ***	%	100	100	150.000.000	100	158.000.000	100	167.000.000	100	270.000.000	100	298.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi ****							150.000.000		158.000.000		167.000.000		270.000.000		298.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlayaninya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan ****	%	100	100	150.000.000	100	158.000.000	100	167.000.000	100	270.000.000	100	298.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
				Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						75.000.000		77.000.000		80.000.000		98.000.000		109.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	96	100	75.000.000	120	77.000.000	130	80.000.000	140	98.000.000	150	109.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH
				Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						15.000.000		16.000.000		17.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	96	100	15.000.000	120	16.000.000	130	17.000.000	140	35.000.000	150	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH
				layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						15.000.000		16.000.000		17.000.000		31.000.000		35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	11	15.000.000	12	16.000.000	13	17.000.000	14	31.000.000	15	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						15.000.000		16.000.000		17.000.000		28.000.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	11	15.000.000	12	16.000.000	13	17.000.000	14	28.000.000	15	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota& *****						10.000.000		11.000.000		12.000.000		28.000.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	1	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	2	28.000.000	2	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						10.000.000		11.000.000		12.000.000		30.000.000		32.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	8	10.000.000	9	11.000.000	10	12.000.000	11	30.000.000	12	32.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						10.000.000		11.000.000		12.000.000		20.000.000		22.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Keluarga Berkualitas *										839.700.000		959.000.000		1.072.000.000		1.610.000.000		1.730.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) *	Angka	74,8	77,06		77,79		78,37		78,84		79,25		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Terkendalinya Jumlah Penduduk **									477.000.000		520.000.000		557.000.000		730.000.000		730.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
						Total Fertility Rate (TFR) **	Angka	2,03	2,1	477.000.000	2,1	520.000.000	2,1	557.000.000	2,1	730.000.000	2,1	730.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) ***								477.000.000		520.000.000		557.000.000		730.000.000		730.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
					Meningkatnya kesertaan KB	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) ***	%	65,5	69,48	477.000.000	69,49	520.000.000	69,5	557.000.000	69,51	730.000.000	69,52	730.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
			Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal ****							440.000.000		480.000.000		515.000.000		670.000.000		670.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
					Meningkatnya Akseptor KB MKJP	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP ****	%	27,1	27,9	440.000.000	28,3	480.000.000	28,7	515.000.000	29	670.000.000	29,3	670.000.000	Pokja Keluarga Berencana	
				Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal *****					90.000.000		100.000.000		110.000.000		180.000.000		180.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
					Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal *****	Dokumen	40	20	90.000.000	30	100.000.000	30	110.000.000	40	180.000.000	40	180.000.000	Pokja Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, JAWA TENGAH
				Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana *****						50.000.000		60.000.000		65.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) *****	Daerah	7	4	50.000.000	4	60.000.000	4	65.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	Pokja Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja *****						300.000.000		320.000.000		340.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
					Terlaksananya Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja *****	Daerah	18	7	300.000.000	10	320.000.000	10	340.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	Pokja Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, JAWA TENGAH
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB ****							37.000.000		40.000.000		42.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
					Menurunnya jumlah PUS tidak terlayani menggunakan kontrasepsi modern	Unmetneed KB ****	%	9,5	9,25	37.000.000	9	40.000.000	8,75	42.000.000	8,5	60.000.000	8,4	60.000.000	Pokja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KB	
				Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB *****						37.000.000		40.000.000		42.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
					Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB *****	Organisasi	2	3	37.000.000	3	40.000.000	3	42.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	Pokja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KB	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga **									362.700.000		439.000.000		515.000.000		880.000.000		1.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) **	Angka	63,9	64,5	362.700.000	64,75	439.000.000	65	515.000.000	65,3	880.000.000	65,5	1.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ***								114.700.000		129.000.000		145.000.000		235.000.000		285.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mengintregasikan GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan	Persentase kabupaten/kota yang mengintregasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah ***	%	68	75	114.700.000	80	129.000.000	85	145.000.000	90	235.000.000	95	285.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk ****							109.700.000		122.000.000		135.000.000		220.000.000		260.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi penyusunan GDPK 5 Pilar	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan ****	Kabupaten/ Kota	25	28	109.700.000	29	122.000.000	30	135.000.000	32	220.000.000	35	260.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	
				Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat *****						25.000.000		25.000.000		28.000.000		55.000.000		70.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat *****	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	25.000.000	1	28.000.000	1	55.000.000	1	70.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Advokasi dan Sosialisasi GDPK *****						54.700.000		60.000.000		65.000.000		85.000.000		90.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK *****	Laporan	2	3	54.700.000	3	60.000.000	3	65.000.000	3	85.000.000	3	90.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi *****						18.000.000		22.000.000		25.000.000		50.000.000		60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi *****	Dokumen	2	2	18.000.000	2	22.000.000	2	25.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
				Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain *****						12.000.000		15.000.000		17.000.000		30.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain *****	Daerah	2	2	12.000.000	2	15.000.000	2	17.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi ****							5.000.000		7.000.000		10.000.000		15.000.000		25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Tersedianya dokumen pemetaan Perkiraan Penduduk	Jumlah dokumen profil pembangunan kependudukan. ****	Dokumen	N/A	1	5.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) *****						5.000.000		7.000.000		10.000.000		15.000.000		25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat provinsi (Termasuk diseminasi hasil penyusunan profil, penetapan parameter, dan evaluasi parameter Pengendalian Penduduk dan KB dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga *****	Dokumen	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) ***								248.000.000		310.000.000		370.000.000		645.000.000		715.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Meningkatnya kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutan	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan ***	%	30,3	34	248.000.000	36	310.000.000	38	370.000.000	40	645.000.000	42	715.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
			Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ****							80.000.000		110.000.000		135.000.000		280.000.000		280.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Menurunnya jumlah perempuan melahirkan pertama kali di usia 15 - 19 tahun	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) ****	per 1000 WUS 15 -19 tahun	17,3	16	80.000.000	15	110.000.000	14	135.000.000	13	280.000.000	12	280.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	
				Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB *****						20.000.000		30.000.000		40.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB *****	Organisasi	3	3	20.000.000	3	30.000.000	3	40.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
				Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana *****						30.000.000		40.000.000		45.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana *****	Kelompok	N/A	3	30.000.000	3	40.000.000	3	45.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
				Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja *****						30.000.000		40.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja *****	Daerah	3	3	30.000.000	3	40.000.000	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ****							168.000.000		200.000.000		235.000.000		365.000.000		435.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Meningkatnya kelompok UPPKA yang aktif	Persentase kelomppok UPPKA yang aktif ****	%	92,9	95	58.000.000	96	70.000.000	97	85.000.000	98	165.000.000	98,5	185.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	
				Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas *****						25.000.000		30.000.000		40.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas di	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas *****	Kabupaten/ Kota	3	3	25.000.000	3	30.000.000	3	40.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					tingkat kabupaten/kota															
				Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota *****						33.000.000		40.000.000		45.000.000		65.000.000		85.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota *****	Laporan	1	2	33.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	65.000.000	2	85.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH
					Meningkatnya kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL) yang aktif	Persentase kelomppok tribina yang aktif ****	%	92,9	95	110.000.000	96	130.000.000	97	150.000.000	98	200.000.000	98,5	250.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	
				Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga *****					110.000.000		130.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
					Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga *****	Organisasi	3	2	110.000.000	2	130.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					(UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga															
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana *										16.382.117.000		16.369.840.000		17.083.532.000		22.699.427.000		22.740.002.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana *	Angka	87,51	87,7		87,8		87,9		88		88,1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana **									272.000.000		272.000.000		315.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana **	Angka	2,92	2,95	272.000.000	2,98	272.000.000	3	315.000.000	3,05	400.000.000	3,08	400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								272.000.000		272.000.000		315.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ***	%	45	55	272.000.000	60	272.000.000	62	315.000.000	65	400.000.000	67	400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****							272.000.000		272.000.000		315.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	40	50	272.000.000	55	272.000.000	55	315.000.000	55	400.000.000	55	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****						65.000.000		65.000.000		70.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	1	7	65.000.000	7	65.000.000	7	70.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****						77.000.000		77.000.000		85.000.000		110.000.000		110.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	1	5	77.000.000	5	77.000.000	5	85.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****						90.000.000		90.000.000		100.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	1	90.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****						40.000.000		40.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	1	40.000.000	1	40.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana **									16.110.117.000		16.097.840.000		16.768.532.000		22.299.427.000		22.340.002.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana **	Angka	88,87	89	16.110.117.000	89,1	16.097.840.000	89,3	16.768.532.000	89,5	22.299.427.000	89,8	22.340.002.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								15.521.917.000		15.499.840.000		16.126.532.000		21.409.427.000		21.450.002.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ***	%	90	100	15.521.917.000	100	15.499.840.000	100	16.126.532.000	100	21.409.427.000	100	21.450.002.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							12.950.728.000		12.950.728.000		13.231.392.000		14.435.000.000		14.435.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	1	1	12.950.728.000	1	12.950.728.000	1	13.231.392.000	1	14.435.000.000	1	14.435.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****						12.610.728.000		12.610.728.000		12.851.392.000		14.000.000.000		14.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	60	65	12.610.728.000	70	12.610.728.000	70	12.851.392.000	70	14.000.000.000	70	14.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						310.000.000		310.000.000		340.000.000		370.000.000		370.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	1	1	310.000.000	1	310.000.000	1	340.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****						20.000.000		20.000.000		25.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****						10.000.000		10.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****							62.000.000		62.000.000		90.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	62.000.000	1	62.000.000	1	90.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						60.000.000		60.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						2.000.000		2.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							108.000.000		108.000.000		150.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	90	90	108.000.000	90	108.000.000	90	150.000.000	90	190.000.000	90	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****						10.000.000		10.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****						0		0		0		0		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	20	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****						38.000.000		38.000.000		50.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	25	20	38.000.000	25	38.000.000	25	50.000.000	25	70.000.000	25	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****						60.000.000		60.000.000		80.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	50	50	60.000.000	50	60.000.000	60	80.000.000	60	90.000.000	70	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Perundang-Undangan															
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							453.000.000		453.000.000		555.000.000		919.427.000		919.427.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	90	90	453.000.000	90	453.000.000	90	555.000.000	90	919.427.000	90	919.427.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						8.000.000		8.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						64.000.000		64.000.000		70.000.000		244.427.000		244.427.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	5	2	64.000.000	5	64.000.000	5	70.000.000	5	244.427.000	5	244.427.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10.000.000		10.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	2	1	10.000.000	2	10.000.000	2	20.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						124.000.000		124.000.000		130.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	124.000.000	12	124.000.000	12	130.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						8.000.000		8.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	5	1	8.000.000	3	8.000.000	4	15.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						26.000.000		26.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	3	1	26.000.000	1	26.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						0		0		35.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	N/A	0	N/A	0	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						135.000.000		135.000.000		150.000.000		170.000.000		170.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	135.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						7.000.000		7.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****						71.000.000		71.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	1	1	71.000.000	1	71.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							33.000.000		33.000.000		52.000.000		2.455.000.000		2.455.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	5	3	33.000.000	3	33.000.000	3	52.000.000	3	2.455.000.000	3	2.455.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						0		0		0		2.000.000.000		2.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pengadaan Mebel *****						10.000.000		10.000.000		15.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	5	1	10.000.000	2	10.000.000	3	15.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						7.000.000		7.000.000		10.000.000		330.000.000		330.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	7.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****						7.000.000		7.000.000		10.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	7.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						2.000.000		2.000.000		7.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	4	1	2.000.000	2	2.000.000	3	7.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						7.000.000		7.000.000		10.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	7.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							1.565.000.000		1.543.140.000		1.653.140.000		2.205.000.000		2.205.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1	1	1.565.000.000	1	1.543.140.000	1	1.653.140.000	1	2.205.000.000	1	2.205.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					perangkat daerah															
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						2.000.000		2.000.000		10.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	10.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						310.000.000		310.000.000		350.000.000		600.000.000		600.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	310.000.000	1	310.000.000	1	350.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						3.000.000		3.000.000		5.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						1.250.000.000		1.228.140.000		1.288.140.000		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1.250.000.000	1	1.228.140.000	1	1.288.140.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							350.189.000		349.972.000		395.000.000		1.085.000.000		1.125.575.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	350.189.000	1	349.972.000	1	395.000.000	1	1.085.000.000	1	1.125.575.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						148.189.000		147.972.000		150.000.000		300.000.000		305.575.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	23	24	148.189.000	25	147.972.000	25	150.000.000	25	300.000.000	25	305.575.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya *****														
				Pemeliharaan Mebel *****						2.000.000		2.000.000		15.000.000		35.000.000		70.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	3	3	2.000.000	3	2.000.000	4	15.000.000	4	35.000.000	4	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						120.000.000		120.000.000		130.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	2	2	120.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000	2	500.000.000	3	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						80.000.000		80.000.000		100.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	8	3	80.000.000	4	80.000.000	5	100.000.000	6	250.000.000	7	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								588.200.000		598.000.000		642.000.000		890.000.000		890.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ***	%	90	100	588.200.000	100	598.000.000	100	642.000.000	100	890.000.000	100	890.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							50.000.000		53.000.000		60.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun di UPTD PPA ****	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	53.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						50.000.000		53.000.000		60.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	1	1	50.000.000	1	53.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							185.000.000		185.000.000		190.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan di UPTD PPA ****	%	100	90	185.000.000	90	185.000.000	90	190.000.000	90	250.000.000	90	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****						185.000.000		185.000.000		190.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	1	185.000.000	1	185.000.000	1	190.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							58.200.000		61.000.000		68.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPTD PPA ****	%	90	90	58.200.000	90	61.000.000	90	68.000.000	90	120.000.000	90	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						2.000.000		3.000.000		5.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	5	4	2.000.000	5	3.000.000	5	5.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						32.000.000		33.000.000		35.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	32.000.000	1	33.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						3.500.000		4.000.000		5.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	3.500.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						20.700.000		21.000.000		23.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	20.700.000	1	21.000.000	1	23.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							3.000.000		3.000.000		7.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan di UPTD PPA ****	Unit	1	3	3.000.000	3	3.000.000	3	7.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
				Pengadaan Mebel *****						3.000.000		3.000.000		7.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	3.000.000	1	3.000.000	1	7.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							254.000.000		254.000.000		262.000.000		305.000.000		305.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPTD PPA ****	Laporan	1	1	254.000.000	1	254.000.000	1	262.000.000	1	305.000.000	1	305.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						39.000.000		39.000.000		42.000.000		55.000.000		55.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	39.000.000	1	39.000.000	1	42.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						215.000.000		215.000.000		220.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	215.000.000	1	215.000.000	1	220.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							38.000.000		42.000.000		55.000.000		115.000.000		115.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPTD PPA ****	Unit	1	1	38.000.000	1	42.000.000	1	55.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						13.000.000		14.000.000		15.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pemeliharaan Mebel *****						0		0		7.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	0	1	0	1	7.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						15.000.000		16.000.000		18.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	15.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						10.000.000		12.000.000		15.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	10.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	JAWA TENGAH, OPD Provinsi

Tabel 4. 2
Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil PD	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan	1. Rakor POKJA PUG OPD Provinsi dan Kab/Kota 2. Workshop PUG OPD Provinsi 3. Penguatan PUG bagi Kabupaten/Kota 4. Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan PUG Sinergitas Pentahelix 5. Penyusunan RAD PUG	1. Jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek (390 Orang) 2. Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (25 Lembaga) 3. Dokumen RAD PUG (1 dokumen)	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** **Kegiatan :** Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi **Sub Kegiatan :** 1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi 2. Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Bidang KGPP	1. Seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah 2. **OPD Kunci :** Bappeda, Inspektorat, Dinas Kominfo, Biro Bangda, Biro Organisasi
2	a. Pembentukan Kecamatan Berdaya (pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, disabilitas, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) b. Mendorong Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan, Anak, Disabilitas di setiap Kecamatan	1. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) 2. Sosialisasi Kecamatan Berdaya dan RPPA ke 35 Kabupaten/Kota 3. Pembuatan regulasi untuk mendukung terbentuknya RPPA di Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Kecamatan Berdaya 4. Penguatan kapasitas tenaga pendamping hukum/pelatihan paralegal 5. Pengembangan UMKM Perempuan	1. Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (80 orang) 2. Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (15 orang) 3. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi (1 dokumen)	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** **Kegiatan :** Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi **Sub Kegiatan :** Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** **Kegiatan:** Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi **Sub Kegiatan :** Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Bidang KGPP Bidang PHPA Bidang Dalduk KS	1. Bappeda 2. Dispermadesdukcapil 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Pemuda dan Olahraga 5. Dinas Pariwisata 6. Dinas Koperasi dan UKM 7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 8. Dinas Sosial 9. Dinas Kesehatan 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11. Dinas Perhubungan 12. Biro Kesra 13. BPBD 14. BKKBN Perwakilan Jawa Tengah

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil PD	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		6. Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan 7. Pembentukan dan Penguatan Forum Anak di Kecamatan 8. Pelatihan atau penguatan kader Satyagatra 9. Penguatan Forum Genre melalui PIK-Remaja 10. Festival Anak	4. Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (2 organisasi) 5. Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja (3 daerah)	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** **Kegiatan :** Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** **Kegiatan :** Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi **Sub Kegiatan :** Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** **Kegiatan :** Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga **Sub Kegiatan :** Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja **Kegiatan :** Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah		

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil PD	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
				Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga **Sub Kegiatan :** Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		
3	Mendorong Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan, Anak, Disabilitas di setiap Kecamatan	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (145 Orang) 2. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (100 orang) 3. Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (640 orang)	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** **Kegiatan :** Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** 1. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** **Kegiatan :** Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi **Sub Kegiatan :** 1. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD PPA	1. Dinas Sosial 2. Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Pendidikan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil PD	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
			4. Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (640 orang)	2. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
4	Melahirkan pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat daerah	1. Bimtek Manajemen Risiko 2. Pelayanan Informasi Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (5 dokumen) 2. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (1 dokumen)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** **Kegiatan :** Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Sub Kegiatan :** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Kegiatan :** Administrasi Umum Perangkat Daerah **Sub Kegiatan :** Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sekretariat	1. Bappeda 2. Inspektorat 3. Diskominfo 4. Biro Organisasi 5. Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Tabel 4. 3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	IKG (Indeks Ketimpangan Gender)	Angka	0,336	0,308	0,306	0,304	0,301	0,3	0,297	0,296	0,296
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,34	-	65	65,35	66,7	66,95	67,2	67,5	67,5
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,31	93,44	93,45	93,47	93,49	93,5	93,52	93,55	93,55
4	IPKK (Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga)	Angka	72,63	74,8	76,1	77,06	77,79	78,37	78,84	79,25	79,25
5	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,04	2,03	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,07	63,9	64,25	64,5	64,75	65	65,3	65,5	65,5
7	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83,9	87,51	87,6	87,7	87,8	87,9	88	88,1	88,1
8	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	2,75	2,92	2,93	2,95	2,98	3	3,05	3,08	3,08
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	90,25	88,87	88,9	89	89,1	89,3	89,5	89,8	89,8

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun		Target Kinerja Sasaran						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,336	0,308	0,306	0,304	0,301	0,3	0,297	0,296	0,296
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,34	-	65	65,35	66,7	66,95	67,2	67,5	67,5
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,31	93,44	93,45	93,47	93,49	93,5	93,52	93,55	93,55
4	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Angka	72,63	74,8	76,1	77,06	77,79	78,37	78,84	79,25	79,25
5	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,04	2,03	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,07	63,9	64,25	64,5	64,75	65	65,3	65,5	65,5
7	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83,9	87,51	87,6	87,7	87,8	87,9	88	88,1	88,1
8	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	2,75	2,92	2,93	2,95	2,98	3	3,05	3,08	3,08
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	90,25	88,87	88,9	89	89,1	89,3	89,5	89,8	89,8
10	Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih	%	-	4.25	14	24	34	44	54	64	64
11	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	%	-	10	15	20	25	30	35	40	40
12	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	60,76	-	61	61,5	62	62,5	63	63,5	63,5
14	Jumlah kab/kota dengan predikat KLA minimal Madya	Kab/Kota	-	29	29	30	31	32	33	34	34
15	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak	Lembaga	-	35	35	35	35	35	35	35	35
16	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	77,86	-	78,5	79	79,4	79,9	80,5	81	81
17	Persentase kab/kota yang mempunyai rumah perlindungan perempuan dan anak minimal di 1 kecamatan	%	-	-	10	20	40	60	80	100	100
18	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya	Lembaga	-	10	50	50	50	50	50	50	50
19	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	%	-	80	80	80	90	90	90	90	90
20	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya	%	-	-	20	40	60	80	100	100	100
21	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	-	10,37	11	12	13	14	15	16	16
22	Nilai Evaluasi PUG Provinsi	Nilai	901	901	900	900	900	900	900	900	900
23	Persentase UPTD PPA kab/kota sesuai standart layanan	%	-	14	71	85	95	100	100	100	100
24	Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan rumah perlindungan perempuan dan anak minimal di 1 kecamatan	%	-	-	10	20	40	60	80	100	100

25	Jumlah UPTD PPA yang terbentuk dan difasilitasi pengembangannya	Unit	-	10	15	17	20	30	35	35	35
26	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	%	-	10	15	20	25	30	35	40	40
27	Persentase kab/kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga	%	-	14	16	20	25	30	35	40	40
28	IPKK (Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga)	Angka	0	74,8	76,1	77,06	77,79	78,37	78,84	79,25	79,25
29	*Total Fertility Rate (TFR)*	Angka	2,04	2,03	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
30	Persentase *Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)*	%	-	65,5	69,47	69,48	69,49	69,5	69,51	69,52	69,52
31	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	-	27,10	27,50	27,9	28,3	28,7	29	29,3	29,3
32	*Unmetneed KB*	%	-	9,3	9,5	9,25	9	8,75	8,5	8,4	8,4
33	Persentase Pemda yang mengintregasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	%	-	68	71	75	80	85	90	95	95
34	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan	Kab/Kota	-	25	26	28	29	30	32	35	35
35	Jumlah dokumen profil pembangunan kependudukan.	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1
36	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	-	30,30	32	34	36	38	40	42	42
37	ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 - 19 tahun	Angka	17,3	17,3	17	16	15	14	13	12	12
38	Persentase kelomppok UPPKA yang aktif	%	-	92,9	94	95	96	97	98	98,5	98,5
39	Persentase kelomppok tribina yang aktif	%	-	92,9	94	95	96	97	98	98,5	98,5
40	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83,9	87,51	87,6	87,7	87,8	87,9	88	88,1	88,1
41	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	2,75	2,92	2,93	2,95	2,98	3	3,05	3,08	3,08
42	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	90	90	90	100	100	100	100	100	100
43	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	100	45	50	55	60	62	65	67	67
44	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	40	50	50	55	55	55	55	55
45	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90
48	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90

49	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	5	5	3	3	3	3	3	3
50	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Dalam upaya penyelarasan program dan kegiatan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tertuang dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), beberapa intervensi target yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah antara lain Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP). KBPP merupakan pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari. Tujuannya untuk mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan, dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat. Realisasi Capaian KBPP melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Kemendukbangga/BKKBN terhadap jumlah ibu bersalin pada semester 1 tahun 2025 sebesar 77,61% atau sebanyak 109.359 dari 140.910 ibu bersalin telah menggunakan KB Pasca Persalinan.

Indikator lain yang harus diintervensi yaitu Kehamilan yang tidak direncanakan (KTD). KTD menghitung jumlah ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian dibagi dengan jumlah ibu hamil saat pendataan. Realisasi KTD di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yaitu sebesar 12,7%. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat memiliki dampak meningkatnya *TFR* secara signifikan apabila tidak segera diintervensi. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil meliputi : edukasi seksual dan reproduksi yang kuat bagi PUS, meningkatkan akses dan kualitas metode kontrasepsi, meningkatkan kesadaran akan dampak menikah muda terhadap kesehatan reproduksi serta konseling layanan kesehatan reproduksi.

Indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi PBK sebagai alat ukur dalam memahami kondisi PBK. Terdapat 5 (lima) dimensi pembentuk IPBK, yaitu 1) Dimesi Partisipasi. 2) Dimensi Keberlanjutan; 3) Dimensi Inklusivitas, 4) Dimensi Holistik Integratif dan 5) Dimensi Kesetaraan. Capaian IPBK Nasional tahun 2024 sebesar 61,8 sedangkan capaian Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sudah diatas capaian nasional sebesar 63,4.

Remaja merupakan bagian terbesar dari struktur penduduk Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang berada pada fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) sangat dominan. Remaja menjadi pintu masuk menuju kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul di masa depan. Remaja yang sehat, bebas dari kekerasan, serta memiliki pemahaman tentang kesetaraan gender, akan melahirkan generasi penerus yang lebih baik. Indeks Pengasuhan Remaja tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah sebesar 86,5 sedangkan angka nasional sebesar 84,7. Hal tersebut menunjukkan Indeks Pengasuhan Remaja Provinsi lebih tinggi daripada nasional.

Tabel 4. 5
Target Penyelarasan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2029

Indikator	Baseline 2024	Target				
		2026	2027	2028	2029	2030
Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP)	77,61% (TW II 2025)	77,9%	78%	78,5%	79%	79,5%
Persentase Kehamilan Yang Tidak Direncanakan (KTD)	14,7%	12,10%	11,82%	11,55%	11,29%	11,04%
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	63,4	63,95	64,23	64,50	64,77	65,04
Indeks Pengasuhan Remaja	86,49	88,28	89,08	89,83	90,53	91,18

Sumber : BKKBN

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana jangka menengah periode 5 (lima) tahunan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaanya dan apabila ketersediaan anggaran (APBD dan APBN) tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain: 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah RPJMD; 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besar mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah RPJMD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

5.2 Kaidan Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

a. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
d. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Perubahan Renstra perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Mendorong Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Kecamatan Berdaya;
b. Mendorong Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) pada Kecamatan Berdaya;
c. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah;
d. Advokasi pemenuhan hak anak di Kabupaten/Kota dan peningkatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
e. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan dari Provinsi sampai ke tingkat Desa dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta kabupaten/kota;
f. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja dan Kabupaten/Kota termasuk pada Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA);
g. Melakukan upaya yang signifikan guna meningkatkan kesertaan keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dukungan layanan KB, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta efektivitas Kampung KB;
h. Perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga . melalui peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan UPPKA secara efektif dan berkelanjutan;
i. Mengembangkan teknologi informasi yang mendukung kinerja PPPA dan Dalduk KB secara berkelanjutan dan terintegrasi.

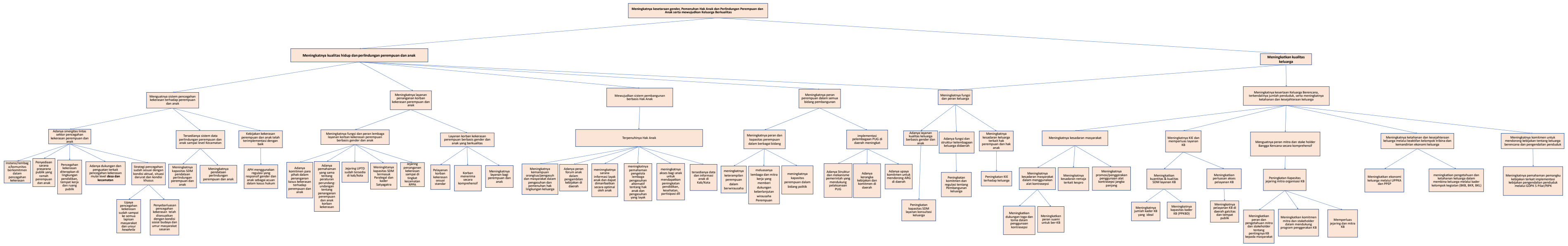
Meningkatnya kesetaraan gender, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta mewujudkan Keluarga Berkualitas
Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Meningkatkan kualitas keluarga
Menguatnya sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Meningkatnya layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak
Mewujudkan sistem pembangunan berbasis Hak Anak
Meningkatnya peran perempuan dalam semua bidang pembangunan
Meningkatnya fungsi dan peran keluarga
Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana, terkendalinya jumlah penduduk, serta meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Adanya sinergitas lintas sektor pencegahan kekerasan perempuan dan anak
Tersedianya sistem data perlindungan perempuan dan anak sampai level Kecamatan
Kebijakan kekerasan perempuan dan anak telah terimplementasi dengan baik
Meningkatnya fungsi dan peran lembaga layanan korban kekerasan perempuan berbasis gender dan anak
Layanan korban kekerasan perempuan berbasis gender dan anak yang berkualitas
Terpenuhinya Hak Anak
Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang
implementasi pelembagaan PUG di daerah meningkat
Adanya layanan kualitas keluarga berbasis gender dan anak
Adanya fungsi dan struktur kelembagaan keluarga didaerah
Meningkatnya kesadaran keluarga terkait hak perempuan dan hak anak
Meningkatnya kesadaran masyarakat
Meningkatnya KIE dan memperluas layanan KB
Menguatnya peran mitra dan stake holder Bangga Kencana secara komprehensif
Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui keaktifan kelompok tribina dan kemandirian ekonomi keluarga
Meningkatnya komitmen untuk mendorong kebijakan tentang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
Instansi/lembaga/komunitas berkomitmen dalam pencegahan kekerasan
Penyediaan sarana prasarana publik yang ramah perempuan dan anak
Pencegahan kekerasan diterapkan di lingkungan pendidikan, tempat kerja dan ruang publik
Adanya dukungan dan penguatan terkait pencegahan kekerasan mulai level **desa dan kecamatan**
Strategi pencegahan sudah sesuai dengan kondisi aktual, situasi darurat dan kondisi khusus
Upaya pencegahan kekerasan sudah sampai ke semua lapisan masyarakat dan unsur *hexahelix*
Penyebarluasan pencegahan kekerasan telah disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan umur masyarakat sasaran
Meningkatnya kapasitas SDM pendataan perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya pendataan perlindungan perempuan dan anak
APH menggunakan regulasi yang responsif gender dan anak sebagai acuan dalam kasus hukum
Adanya komitmen para pihak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Adanya pemahaman yang sama tentang peraturan perundang-undangan tentang penanganan perempuan dan anak korban kekerasan
Jejaring UPTD sudah tersedia di kab/kota
Meningktanya kapasitas SDM termasuk Paralegal dan kader Satyagatra
Jejaring penanganan kekerasan sampai di tingkat kecamatan RPPA
Pelayanan korban kekerasan sesuai standar
Korban menerima secara komprehensif
Meningkatnya layanan bagi perempuan dan anak
Meningkatnya kemampuan orangtua/pengasuh dan masyarakat dalam pengasuhan dan pemenuhan hak lingkungan keluarga
Adanya peran forum anak dalam pengambilan kebijakan di daerah
meninngkatnya sarana informasi layak anak dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak
meningkatnya pemahaman pengelola lembaga pengasuhan alternatif tentang hak anak dan pengasuhan yang layak
meningkatnya akses bagi anak untuk mendapatkan peningkatan pendidikan, kesehatan, partisipasi dll
tersedianya data dan informasi anak di Kab/Kota
meningkatnya keterampilan perempuan dalam berwirausaha
meluasanya lembaga dan mitra kerja yang memberi dukungan keberlanjutan wirausaha Perempuan
meningkatnya kapasitas perempuan dalam bidang politik
Adanya Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG
Adanya kerangka kebijakan dan komitmen di daerah
Adanya upaya komitmen untuk mendorong ARG di daerah
Peningkatan kapasitas SDM layanan konsultasi keluarga
Peningkatan komitmen dan regulasi tentang Pembangunan keluarga
Peningkatan KIE terhadap keluarga
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi
Meningkatnya kesadaran remaja terkait kespro
Meningkatnya promosi/penggerakan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang
Meningkatkan dukungan toga dan toma dalam penggunaan kontrasepsi
Meningkatkan peran suami untuk ber-KB
Meningkatkan kuantitas & kualitas SDM layanan KB
Meningkatkan perluasan akses pelayanan KB
Meningkatnya jumlah kader KB yang ideal
Meningkatnya kapasitas kader KB (PPKBD)
Meningkatnya pelayanan KB di daerah galcitas dan tempat publik
Peningkatan Kapasitas jejaring mitra organisasi KB
Meningkatkan peran dan pengetahuan mitra dan stakeholder tentang pentingnya KB kepada masyarakat
Meningkatkan komitmen mitra dan stakeholder dalam mendukung program penggerakan KB
Memperluas jejaring dan mitra KB
Meningkatkan ekonomi keluarga melalui UPPKA dan PPEP
meningkatkan pengetahuan dan ketahanan keluarga dalam membina keluarga melalui kader kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)
Meningkatnya pemahaman pemangku kebijakan terkait implementasi kebijakan pengendalian penduduk melalui GDPK 5 Pilar/PJPK

CASCADIN

SASARAN RPJMD	**MEWUJUDKAN SUMBE**
TUJUAN	**Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan Anak**
STRATEGI	**Meningkatkan peran perempuan dalam semua bidang pembangunan**
TARGET	**IKG (Indeks Ketimpangan Gender) baseline 2023 : 0,336 ; 2024 : 0,308** **Target 2025 : 0,306 ; 0,304 ; 0,301 ; 0,3 ; 0,297 ; 0,296**

SASARAN	**Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang pembangunan**	
INDIKATOR	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	
TARGET	Baseline 2023 : 93,31 ; 2024 : 93,44. Target : 93,45 ; 93,47 ; 93,49 ; 93,5 ; 93,52 ; 93,55	

UNIT/SUB UNIT KERJA	**BIDANG KGPP**		**BIDANG KGPP**	**BIDANG KGPP**	**UPTD**	**BIDANG PHPA**	**BIDANG PHPA**
PROGRAM	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**		**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Program Pemenuhan Hak Anak**	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**
SASARAN STRATEGIS PROGRAM	***Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Provinsi***	***Meningkatnya kapasitas perempuan di bidang ekonomi***	***Meningkatnya komitmen pemda yang dalam pembangunan ketahanan keluarga***	***Meningkatnya jumlah layanan lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat kab/kota sesuai standart***	***Meningkatnya pelayanan korban kekerasan perempuan secara komprehensif***	***Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak***	***Meningkatnya kualitas lembaga Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak di Kabupaten/Kota***
OUTPUT	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi. (DO : Jumlah ARG pada Belanja Operasi dan Modal dibagi Jumlah seluruh Belanja Operasi APBD (Belanja Barang, Hibah, Bansos) dan Belanja Modal APBD)	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha (DO : perempuan yang menjadi wirusaha dibagi perempuan yang sudah dilatih)	% kab/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga. (DO : Kab/kota yang memiliki kebijakan ketahanan keluarga dibagi jumlah kab/kota di jawa tengah)	% UPTD PPA kab/kota sesuai standart layanan (DO : UPTD PPA yang memenuhi standart layanan dibagi dengan jumlah UPTD yang sudah terbentuk)	% korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif. (DO : perempuan korban kekerasan yang melapor, dirujuk maupun dijangkau, mendapatkan layanan dari UPTD PPA.	INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA)	% lembaga layanan keluarga yang terlatih (DO : jumlah lembaga layanan keluarga yang dilatih dibagi jumlah layanan keluarga yang tercatat yaitu satyagatra, puspaga, LKKNU, aisiyyah di Kabupaten/Kota)
TARGET	Baseline 2024 : 10,37 Target : 11, 12, 13, 14, 15,16	Baseline 2024 : 80 Target : 80,80,90,90,90,90	Baseline 2024 : 10%. target : 15, 20, 25, 30, 35,40	(Baseline 2024 : 10 uptd (14%). Target : 71,85,95,100,100,100)	Baseline 100%. Target : 100, 100, 100, 100, 100)	Baseline 2023 : 60,76. Target 2025 : 61 ; 61,5 ;62 ; 62,5 ; 63 ; 63,5	Baseline 2024 : 29 (4,25%) Target : 14 ; 24 ; 34 ; 44 ; 54 ;64

UNIT/SUB UNIT KERJA	**SEKSI KG**		**SEKSI KG**	**SEKSI PP**		**UPTD**	**SEKSI PHA**		**SEKSI PHA**
KEGIATAN	Kegiatan Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan Prov	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi pd Ormas Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang meliibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yg memerlukan koordinasi tingkat daerah Prov dan lintas daerah kab/kota	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, nonpemerintah & dunia usaha kewenangan Provinsi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	*Tersedianya hasil evaluasi penyelenggaraan PUG di Provinsi*	*Meningkatnya kapasitas perempuan dalam kelembagaan diberbagai bidang pembangunan*	*Meningkatnya kualitas pembangunan ketahanan keluarga*	*Meningkatnya kab/kota yang meningimplementasikan rumah perlindungan perempuan di kecamatan*	*Meningkatnya jumlah lembaga penyedia layanan di Kab/Kota yang terstandarisasi*	*Terlayaninya korban kekerasan perempuan yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan*	*Meningkatnya predikat KLA kab/kota*	*Meningkatnya jumlah lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak yang mendapat KIE Layanan Ramah Anak*	*Meningkatnya ketersediaan Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak*
OUTPUT	Nilai Evaluasi PUG Provinsi (900,900,900,900,900) (DO : nilai hasil evaluasi Pusat terhadap Implementasi PUG di Provinsi)	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya (DO : jumlah perempuan yang meningkat pemahamannya dibagi perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas	Persentase kab/kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga. (DO : Kab/kota yang mendapat pendampingan intensif kebijakan pembangunan ketahanan keluarga dibagi 35)	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan (DO : Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan dibagi 576)	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi (DO : jumlah UPTD PPA Kab/Kota yang menuju standar dibagi 35 kab/kota)	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (DO : Jumlah perempuan korban kekerasan yang sudah mendapat layanan rujukan lanjutan dibagi jumlah korban perempuan kekerasan yang harus mendapat layanan rujukan lanjutan)	Jumlah kab/kota dengan predikat KLA minimal Madya. (DO : Jumlah Kab/Kota yang mendapat KLA Minimal Madya)	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak. (DO : lembaga layanan di Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang mendapat sosialisasi dan advokasi terkait PHA)	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak
TARGET	Baseline 2023 : 901 Target : 900,900,900,900,900,900	Target : 20, 40, 60, 80, 100,100	(Baseline 2023 : 5 kab/kota 14% Target : 16, 20, 25, 30, 35, 40)	Baseline 2024 : 0 Target : 20;25;30;35;50;60	Baseline 2024 : 0 Target : 10, 15, 20, 25, 30, 35)	Baseline 2024 : 100 Target : 100,100,100,100,100,100	Baseline 2024 : 29, Target : 29, 30, 31,32,33,34	Baseline 2024 : 35 Target : 35, 35, 35, 35, 35,35)	Baseline : 100% Target 100%;100%;100%,100%, 100%,100%)
SUB KEGIATAN	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (DAK)	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi (DAK)	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, lamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN STRATEGIS SUB KEGIATAN	*Terlaksanya pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi*	*Terlaksanya advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi*	*Terlaksanaanya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi*	*Terlaksananya pemahaman perempuan tentang pendidikan politik*	*Terlaksananya advokasi terhadap lembaga masyarakat*	*Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan*	*Terlaksanaanya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga*	*Adanya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi*	*Terlaksanaanya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO*	*Terlaksanaanya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP*	*Meningkatnya advokasi pada lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan*	*Terlaksanaanya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perempuan*	*Terlaksanaanya peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan kekerasan pada perempuan*	*Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan*	*Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan*	*Tersedianya Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan*	*Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan*	*layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin*	*Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan*	*Terlaksanaanya Advokasi dan sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak*	*Terlaksanaanya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak*	*Terlaksanaanya pengembangan kapasitas lembaga dalam KIE pemenuhan hak anak*	*Terlaksanaanya pendampingan dan pengembangan bagi lembaga penyedia layanan Kualitas Hidup Anak*	*Tersedianya layanan konsultasi dan konseling keluarga yang berperspektif gender dan hak anak*
OUTPUT	Jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
TARGET	5;5;5;5;5;5	50;50;50;50;50	50;50;70;80;90;100	85 ; 85; 85; 85; 85; 85	3;3;4;4;5;6	80;80;80;80;80;80	10;10;10;10;10;10	1;1;1;1;1;1	35;35;35;35;35;35	35 ; 35; 35; 35; 35; 35	5;5;5;5;5;5	1;1;1;1;1;1	15;15;15;20;20;20	(2024 : 60. Target 20,20,20;20;20;20)	(2024 : 60. Target 20;25;30,30,30;30)	10,11,12,13,14,15	1,1,1,1,1,1	10,11,12,13,14,15	1,1,2,2,2,2	7,8,9,10,11,12	20,20,20;20;20;20	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10	20;20;20;20;20;20

IG URUSAN PPPA-DALDUKKB

R DAYA MANUSIA BERDAYA SAING DAN BERKARAKTER

Meningkatnya keluarga berkualitas

Meningkatkan kualitas penduduk dalam upaya membangun keluarga yang berkualitas

IPKK (Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga). Baseline 2023 : 72,63.
Target : 76,1 ; 77,06 ; 77,79 ; 78,37 ; 78,84 ; 79,25

Meningkatnya Perlindungan Anak

IPA (Indeks Perlindungan Anak)

Baseline 2023 : 64,34 (Target : 65 ; 65,35 ; 66,70 ; 66,95 ; 67,2 ; 67,5)

BIDANG PHPA

Program Perlindungan Khusus Anak

Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Baseline 2023 : 77,86.
Target : 78,5 ; 79 ; 79,4 ; 79,9 ; 80,5 ; 81

SEKSI PA

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penguatan & pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yg memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Prov & lintas daerah kab/kota
Meningkatnya kab/kota yang mengimplementasikan rumah perlindungan anak di kecamatan	*Meningkatnya kapasitas lembaga layanan perlindungan anak layanan anak memerlukan perlindungan khusus yang difasilitasi dan dikuatkan*
Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak (DO : kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak dibagi 576)	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya (DO : Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang diberikan fasilitasi pelatihan atau mendapatkan advokasi)
Baseline 2024 : 0 Target : 20;25;30;35;50;60	Baseline 2024 : 10. Target : 50, 50, 50, 50, 50, 50

Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. kewenangan provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Perangangan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
Adanya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA	*Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA*	*Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA*	*Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan*	*Terlaksananya pendampingan dan penguatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus*	*Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus*	*Adanya komitmen dalam rangka Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi*
Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)
1;1;1;1;1;1	35 ; 35; 35; 35; 35; 35	35 ; 35; 35; 35; 35; 35	1;1;1;1;1;1	3;3;3;3;3;3	25;25;25;25;25;25	3;3;3;3;3;3

UPTD

Program Perlindungan Khusus Anak

Meningkatnya pelayanan korban kekerasan anak secara komprehensif

% korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif.
(DO : Anak korban kekerasan yang melapor, dirujuk maupun dijangkau, mendapatkan layanan dari UPTD PPA.

Baseline 100%.
Target : 100, 100, 100, 100, 100)

UPTD

Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yg memerlukan perlindungan khusus yg memerlukan koordinasi tingkat daerah Prov	
Terlayaninya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	
Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan (DO : Jumlah anak korban kekerasan yang sudah mendapat layanan rujukan lanjutan dibagi jumlah korban anak kekerasan yang harus mendapat layanan rujukan lanjutan)	
Baseline : 100 Target : 100,100,100,100,100,100	

Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	*tersedianya layanan pendampingan pada Anak Korban Kekerasan*	*tersedianya Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan*	*tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan*	*layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin*	*tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan*
Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. (2024 : 96.)	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. (2024 : 96.)	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. (DAK)	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan anak perlindungan bagi anak korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
96, 100, 120, 130, 140, 150	96;100, 120, 130, 140, 150	10,11,12,13,14,15	1,1,1,1,1,1	10,11,12,13,14,15	1,1,2,2,2,2	7,8,9,10,11,12

Terkendalinya Jumlah Penduduk

Angka Kelahiran Total (TFR)

(2024 : 2,09. Target : 2,1 ; 2.1 ; 2.1 ; 2.1 ; 2.1 ; 2.1)

BIDANG KB KIE

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Meningkatnya kesertaan KB

% Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)

Baseline 2024 : 69,46.
Target : 69.47 ; 69.48 ; 69.49 ; 69.5 ; 69.51 ; 69.52

SEKSI ADVOKASI KIE DAN KB

Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
Meningkatnya Akseptor KB MKJP	*Menurunnya jumlah PUS tidak terlayani menggunakan kontrasepsi modern*
Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	Unmetneed KB
Baseline 2024 : 27,1. Target : 27.5 ; 27.9 ; 28.30 ; 28.7 ; 29 ; 29.3	Baseline 2024 : 7,70. Target : 7,78 ; 7,76 ; 7,74 ; 7,72 ; 7,7 ; 7,67

Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja (BOKB)	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Adanya kegiatan KIE KB pada Pasangan Usia Subur	*Adanya penggunaan advokasi dan KIE program Bangga Kencana*	*Adanya kerjasama dalam pelaksanaan KIE Program Bangga Kencana*	*Adanya organisasi serta peran kader dan mitra KB di kab/kota*
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Kerjasama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
20;20;30;30;40;40	7-7;10;10;15;15	4;4;4;4;4;4	3;3;3;3;3;3

Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)

(2024 :63,9 Target : 64,25 ; 64,5 ; 64,75 ; 65 ; 65,3 ; 65,5)

BIDANG DALDUKKS

Program Pengendalian Penduduk

Meningkatnya kab/kota yang mengintregasikan GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan

% Pemda yang mengintregasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah.
(DO : Pemda yang sudah menyusun GDPK 5 pilar dan memasukkan substansinya ke dokumen perencanaan didearah dibagi kab/kota se jawa tengah)

Base line 2024 : 68
Target : 71, 75, 80, 85, 90 , 95

SEKSI DALDUK

Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
Meningkatnya kab/kota yang mendapatkan advokasi penyusunan GDPK 5 Pilar	*Tersedianya dokumen pemetaan Perkiraan Penduduk*
Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan (DO : Jumlah Kab/kota yang menyusun GDPK 5 Pilar dibagi 35)	Jumlah dokumen profil pembangunan kependudukan. (DO : Dokumen terkait Laporan Kependudukan /LKP)
Baseline 2024 : 25. Target : 26, 28, 29, 30, 32, 35	Target : 1, 1, 1, 1, 1,1

Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Penyusunan Profil program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)
terlaksanyan advokasi dan sosialisasi GDPK di daerah	*tersedianya dokumen GDPK di tingkat Provinsi yang sudah dimanfaatkan*	*Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan*	*Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain*	*Adanya dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga*
Jumlah laporan pelaksanaan advokasi GDPK.	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain.	Jumlah Dokumen Profil Program Bangga Kencana tingkat provinsi, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
3;3;3;3;3;3	2;2;2;2;2;2	1;1;1;1;1;1	2;2;2;2;2;2	1;1;1;1;1;1

BIDANG DALDUK KS

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Meningkatnya kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutan

% Kampung KB mandiri dan berkelanjutan.
(DO : menghitung persentase Kampung KB Mandiri dan persentase Kampung KB Berkalanjutan)

Baseline 2024 : 30,3% atau 2.534 dari 8.361 kampung kb.
Target : 32,34,36,38,40,42

SEKSI KS

Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
Menurunnya jumlah perempuan melahirkan pertama kali di usia 15 - 19 tahun	*Meningkatnya kelompok UPPKA yang aktif*	*Meningkatnya kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL) yang aktif*
ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 - 19 tahun.	Persentase kelomppok UPPKA yang aktif. (DO : Jumlah UPPKA yang lapor/melaksanakan kegiatan dibagi jumlah UPPKA yang ada)	Persentase kelomppok tribina yang aktif. (DO : Jumlah kelompok BKR,BKB dan BKL yang lapor/melaksanakan kegiatan dibagi jumlah Tribina yang ada)
Baseline 2023 : 17,3. Target : 17, 16. 15. 14. 13. 12	Baseline : 92,9%. Target : 94, 95, 96, 97, 98, 98.5)	Baseline : 92,9%. Target : 94, 95, 96, 97, 98, 98,5)

Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
terlaksanannya pembinaan peningkatan akses dan kualitas ketahanan keluarga dan remaja aktif	*terlaksananya PIK-R yang meskipun fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB*	*terlaksananya sosialisasi dan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana*	*Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga*	*Terlaksanannya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB*	*terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas mitra dan ormas dalam pengelolaan program ketahanan keluarga*
Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Mitra dan Organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
3;3;3;3;3;3	3;3;3;3;3;3	3;3;3;3;3;3	2;2;2;2;2;2	3;3;3;3;3;3	2;2;2;2;2;2

TABEL I
IDENTIFIKASI RISIKO

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indikator Tujuan							
1.	Sasaran Strategis	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Adanya Subordinasi dan ketimpangan gender terhadap perempuan	Risiko Strategis	Pemahaman masyarakat dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender masih parsial	Terjadinya ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Pihak terdampak adalah keluarga	Perempuan
2.	Sasaran Strategis	Meningkatkan keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurun	Risiko Strategis	Ekonomi keluarga yang rendah menjadikan keluarga tersebut rentan perceraian, kekerasan dan permasalahan keluarga	Menghambat kemajuan dan peningkatan kualitas keluarga. Pihak yang terkena Keluarga	Keluarga
	Indikator Sasaran							
1.1	Sasaran Strategis	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	Risiko Strategis	Kapasitas dan ketrampilan perempuan masih rendah	Perempuan belum banyak memberikan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Pihak Yang terkena Perempuan	Perempuan
1.2	Sasaran Strategis	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	Kekerasan Anak masih terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	Risiko Strategis	Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap anak yang sudah ada belum menjadi pedoman stakeholder terkait	Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak	Anak

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Sasaran Strategis	Terkendalinya jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Peningkatan jumlah kelahiran PUS yang signifikan	Risiko Strategis	Kurangnya sosialisasi dan KIE kepada masyarakat tentang pentingnya membatasi kelahiran dan mengatur jarak kelahiran	Menurunnya kesejahteraan keluarga dan kelompok masyarakat rentan miskin bertambah. Pihak yang terkena masyarakat dan keluarga	Masyarakat
2.2	Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Meningkatnya angka kasus Perkawinan Anak	Risiko Strategis	Faktor Ekonomi Keluarga yang tidak mampu membiayai anak ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga menikahkan anak pada usia muda menjadi salah satu jalan untuk mengurangi tanggungan keluarga	Meningkatnya kasus kekerasan dalam keluarga dan angka perceraian, karena belum stabilnya mental anak untuk berkeluarga	Anak, Keluarga
3.1	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Indeks Manajemen Risiko	Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/Penyedia	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.	DP3AP2KB
3.2	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Indeks Kepuasan Masyarakat	Capaian kinerja tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Risiko Operasional	Belum semua penyelenggara layanan mengimplementasikan standar layanan yang telah ditetapkan	Persentase tingkat kepuasan pengguna layanan menurun	DP3AP2KB

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Tujuan									
Adanya Subordinasi dan ketimpangan gender terhadap perempuan	4	4	16	Ada	- Ditetapkannya Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarustamaan Gender - Ditetapkannya Pergub Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengarustamaan Gender - Ditetapkannya Pokja PUG dalam Pengarustamaan Gender di Jawa Tengah - Penyusunan RAD PUG - Memberikan pelatihan terkait penyusunan PPRG bagi perencana di setiap OPD	Belum Memadai	4	3	12
Ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurun	3	4	12	Ada	- Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga - Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan - Pelaksanaan KIE Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- Advokasi Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kab/Kota - Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Rangka Pencegahan KtP dan TPPO				
Indikator Sasaran									
Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	3	4	12	Ada	- Memberikan Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) - Sosialisasi Implementasi Serat Kartini - Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan	Memadai	2	3	6
Kekerasan Anak masih terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	4	4	16	Ada	- Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak - Pelaksanaan FGD Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak - Pelatihan Kader PATBM	Memadai	3	3	9
Peningkatan jumlah kelahiran PUS yang signifikan	3	3	9	Ada	- Sosialisasi dan KIE terkait manfaat KB bagi masyarakat - Kespro bagi remaja dan catin	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- Optimalisasi RPPA di Kecamatan Berdaya				
Meningkatnya angka kasus Perkawinan Anak	2	4	8	Ada	- Kampanye Jo Kawin Bocah - Advokasi Pendidikan Kependudukan dalam Rangka Gerakan Jo Kawin Bocah serta Cegah AKI dan Stunting - Sosialisasi Gerakan Jo Kawin Bocah dalam rangka Penurunan Angka Stunting dan AKI pada Kelompok PIK Remaja di Kampung KB - Optimalisasi Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Memadai	2	3	6
Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/Penyedia	3	4	12	Ada	- Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi di tingkat OPD - Pengawasan proses pengadaan barang/jasa	Memadai	2	2	4
Capaian kinerja tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	2	2	4	Ada	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Pelayanan Informasi	Memadai	1	2	2

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Adanya Subordinasi dan ketimpangan gender terhadap perempuan	16	Kepala Dinas	Pemahaman masyarakat dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender masih parsial	Terjadinya ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Pihak terdampak adalah keluarga
Ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurun	12	Kepala Dinas	Ekonomi keluarga yang rendah menjadikan keluarga tersebut rentan perceraian, kekerasan dan permasalahan keluarga	Menghambat kemajuan dan peningkatan kualitas keluarga. Pihak yang terkena Keluarga
Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	12	Kepala Dinas	Kapasitas dan ketrampilan perempuan masih rendah	Perempuan belum banyak memberikan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Pihak Yang terkena Perempuan
Kekerasan Anak masih terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	16	Kepala Dinas	Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap anak yang sudah ada belum menjadi pedoman stakeholder terkait	Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak
Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/Penyedia	12	Sekretaris	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan/Sasaran								
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Adanya Subordinasi dan ketimpangan gender terhadap perempuan	16	Pemahaman masyarakat dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender masih parsial	Terjadinya ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Pihak terdampak adalah keluarga	- Implementasi Perda PUG secara komprehensif di berbagai sektor - Advokasi kepada Kab/Kota untuk Menyusun regulasi terkait Pengarustamaan Gender - Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan	Kepala Dinas	Semester 2 Tahun 2025
Meningkatkan keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurun	12	Ekonomi keluarga yang rendah menjadikan keluarga tersebut rentan perceraian, kekerasan dan permasalahan keluarga	Menghambat kemajuan dan peningkatan kualitas keluarga. Pihak yang terkena Keluarga	- Memberikan Layanan Edukasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Penjangkauan Penguatan Keluarga	Kepala Dinas	Semester 1 Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- Pelaksanaan Layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) - Sosialisasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok Kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak - Optimalisasi Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak		
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	12	Kapasitas dan ketrampilan perempuan masih rendah	Perempuan belum banyak memberikan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Pihak Yang terkena Perempuan	- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender	Kepala Dinas	Semester 2 Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	Kekerasan Anak masih terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	16	Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap anak yang sudah ada belum menjadi pedoman dan belum terimplentasikan oleh stakeholder terkait	Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak. Pihak yang terkena Anak	- Optimalisasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak - Sinergi antar OPD dalam Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi dalam pelatihan, produksi termasuk kemudahan akses modal - Implementasi Regulasi Pencegahan Anak secara komprehensif - Advokasi Penyusunan Regulasi Pencegahan dan Pelayanan Kekerasan terhadap Anak di Kab/kota - Kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk	Kepala Dinas	Semester 2 Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan dan keluarga dalam upaya mendukung lingkungan yang kondusif		
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Indeks Manajemen Risiko	Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/Penyedia	12	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.	- Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi di tingkat OPD - Pengawasan proses pengadaan barang/jasa	Sekretaris	Semester 2 Tahun 2025

TABEL I
IDENTIFIKASI RISIKO

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program								
1	Sasaran Program	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	Hasil Rekomendasi Pengawasan APIP belum signifikan memperbaiki kinerja PUG di OPD	Risiko Strategis	Kurang optimalnya kinerja APIP dalam melakukan pengawasan PUG di OPD	Pembangunan Daerah belum berorientasi pada isu gender	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	Pemkab dan Pemdes belum memfasilitasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan (misal pemasaran dan perijinan)	Resiko Strategis	Kurangnya komitmen Pemkab dan Pemdes	Perempuan yang difasilitasi pelatihan tidak menjdai wirausaha	Perempuan dan Keluarga
2	Sasaran Program	Program Perlindungan Perempuan	Persentase UPTD PPA kab/kota sesuai standart layanan	Masih ada Pemerintah Kab/kota yang kurang berkomitmen dalam membentuk UPTD	Risiko Operasional	Belum semua isu terkait perlindungan perempuan menjadi prioritas di Kab/kota	Belum semua Kab/kota memiliki UPTD PPA	
3	Sasaran Program	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	Kabupaten/Kota tidak memiliki Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga	Resiko Operasional	Kurangnya komitmen terkait pentingnya Kebijakan Ketahanan Keluarga di Kabupaten/Kota	Kurangnya program/kegiatan yang memfokuskan pada Ketahanan Keluarga	Keluarga dan masyarakat
4	Sasaran Program	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Belum terdapat renaksi pemenuhan hak anak di Kab/kota	Risiko Kemitraan	Belum ada mekanisme evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas KLA	IPHA tidak mencapai target	
5	Sasaran Program	Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan	Risiko Strategis	Kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan dalam upaya pencegahan	Tidak terpenuhinya hak anak atas perlindungan	Anak korban kekerasan

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						kekerasan terhadap anak		
6	Sasaran Program	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pemda yang mengintregasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	Komitmen Tim Penyusun GDPK Kab/kota masih rendah	Risiko Strategis	Kurangnya pemahaman Tim Penyusunan GDPK Kab/Kota dalam menyusun dokumen GDPK	GDPK belum terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan daerah	Pemerintah Daerah
7	Sasaran Program	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	Kurangnya komitmen Pemerintah Desa dalam meningkatkan peran kelompok kegiatan Kampung KB	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen pemerintah desa dan pemahaman masyarakat terkait implementasi kampung kb yang mandiri dan berkelanjutan	Kampung KB belum mampu mendorong peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Desa/ Kelurahan, OPD KB Kab/Kota dan Prov
8	Sasaran Program	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Kehamilan yang tidak diinginkan meningkat yang berisiko stunting	Risiko Operasional	Kurangnya Advokasi sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan KB Modern	Menurunnya Kualitas hidup ibu dan anak	Peserta KB, Pasangan Usia Subur
9	Sasaran Program	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh Kabupaten/Kota pada aplikasi sistem informasi gender dan anak Jawa Tengah (SIGA JATENG)	Kurangnya pemahaman petugas data Kab/Kota dalam mengisi ketersediaan data gender dan anak	Risiko Operasional	Narasumber dalam penyampaian materi kurang dapat dipahami oleh peserta	Peserta dalam proses menginput tidak sesuai dengan ketentuan	Petugas data Kab/Kota
10	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan tingkat ketercapaian kinerja kurang dari target	Risiko Operasional	Target Indikator yang Terlalu Tinggi	Capaian Kinerja OPD tidak memuaskan	OPD PPA DaldukKB
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan	Masyarakat Tidak puas terhadap pelayanan OPD	Risiko Operasional	Belum semua penyelenggara layanan mengimplementasika	Persentase tingkat kepuasan pengguna layanan menurun	OPD PPA DaldukKB

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			keuangan perangkat daerah			n standar layanan yang telah ditetapkan		
Indikator Kegiatan								
1	Sasaran Kegiatan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Nilai Evaluasi PUG Provinsi	Komitmen yang kurang dalam mengidentifikasi ARG	Risiko Operasional	Pergantian personil yang menangani ARG sering terjadi	Nilai Evaluasi PUG tidak mencapai target	OPD Provinsi, Kabupaten dan Kota
2	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya	Peserta tidak memahami Materi yang disampaikan	Risiko Operasional	Metode penyampaian materi kurang tepat	Peserta tidak meningkat pemahamannya	Perempuan
3	Sasaran Kegiatan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan	Belum semua Kab/kota mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah perlindungan di setiap kecamatan	Risiko Kemitraan	Kebijakan masih baru sehingga belum ada kesiapan sumber daya di kecamatan	Kecamatan belum mempunyai Rumah Perlindungan Perempuan	
4	Sasaran Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi	Masih ada lembaga penyedia layanan yang belum menerapkan mekanisme layanan dan perlindungan perempuan sesuai standar	Risiko Operasional	kurangnya sinergitas dan pengawasan antar lembaga penyedia layanan (pemerintah/non pemerintah) terkait upaya perlindungan perempuan	Korban kekerasan tidak terpenuhi hak-haknya	Korban Kekerasan Perempuan
5	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	Data asesmen kasus rujukan kekerasan terhadap perempuan tidak lengkap	Risiko Operaional	'- Perempuan korban kekerasan belum percaya sepenuhnya ke pendamping '- Pendamping di Kab/Kota dalam	Layanan yang diberikan tidak optimal	Perempuan korban kekerasan

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lintas Daerah Kabupaten/Kota				melakukan asesmen belum lengkap tapi sudah langsung merujukkan kasus ke Provinsi		
6	Sasaran Kegiatan	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga	- Penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga di Kab/kota berjalan lambat dan kurang optimal sehingga program-program pembangunan kualitas keluarga di kab/kota kurang mendapatkan prioritas dukungan - Pelaksanaan program-program terkait keluarga masih berjalan secara sektoral di masing-masing perangkat daerah dan elemen masyarakat sehingga capaian pembangunan kualitas keluarga kurang komprehensif	Risiko Operasional	- Pengambil kebijakan di masing-masing kab/kota belum memiliki perspektif yang sama tentang pentingnya menyusun kebijakan terkait pembangunan ketahanan keluarga di daerahnya masing-masing. - koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga masyarakat kurang efektif dan kolaborasi yang kurang solid dalam pelaksanaan program-program pembangunan keluarga	kualitas keluarga di kab/kota kurang tercapai berdasarkan Indeks Kualitas Keluarga	Keluarga
			Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang	- Terdapat layanan keluarga yang meliputi edukasi, konsultasi dan konseling tidak terselenggara sesuai standar di kab/kota	Risiko Operasioal	- Dukungan kebijakan pimpinan daerah yang kurang memprioritaskan	Layanan keluarga yang meliputi edukasi, konsultasi dan konseling yang responsif gender dan anak tidak tersedia	Keluarga

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			responsif gender dan anak			ketersediaan Layanan Keluarga sebagai bagian dari program pembangunan kualitas keluarga di kab/kota - keterbatasan kemampuan kab/kota dalam menyediakan sumber daya yang mendukung terselenggaranya layanan keluarga	secara merata di seluruh kab/kota di Jawa Tengah	
7	Sasaran Kegiatan	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota dengan predikat KLA minimal Madya	Pemahaman Gugus Tugas KLA terhadap indikator penilaian kurang optimal	Risiko Strategis	Kurangnya komitmen Gugus Tugas KLA	Masih terdapat kab/kota yang tidak mendapat KLA minimal Madya	OPD PPA Kab/Kota
8	Sasaran Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak	Lembaga masyarakat dan Dunia Usaha belum sepenuhnya bersinergi dalam peningkatan kualitas hidup anak	Risiko Operasional	kurangnya Kerjasama antara pemerintah daerah dengan Lembaga masyarakat dan dunia usaha	Lembaga masyarakat dan dunia usaha kurang berperan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Anak
9	Sasaran Kegiatan	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak	belum semua kecamatan di kabupaten/kota yang mendukung terbentuknya rumah perlindungan anak	Risiko operasional	Rumah perlindungan anak merupakan kebijakan/program baru sehingga belum ada kesiapan dan kemampuan dalam penyediaan sumber daya di tiap kecamatan	implementasi pencegahan kekerasan terhadap anak di kecamatan kurang optimal	Anak

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Sasaran Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya	AMPK tidak mendapatkan layanan secara terpadu	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi antar penyedia layanan Kurangnya kompetensi SDM Penyedia Layanan dalam memberikan pelayanan yang terpadu	AMPK tidak mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya	AMPK
11	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	Data asesmen kasus rujukan kekerasan terhadap anak tidak lengkap	Risiko Operasional	'- Anak korban kekerasan belum percaya sepenuhnya ke pendamping '- Pendamping di Kab/Kota dalam melakukan asesmen belum lengkap tapi sudah langsung merujukkan kasus ke Provinsi '- Terlapor kasus hak asuh anak kurang proaktif dalam bekerja sama untuk menyelesaikan masalah	Layanan yang diberikan tidak optimal	Anak korban kekerasan
12	Sasaran Kegiatan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	Pembangunan 5 pilar kependudukan belum dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman pemerintah daerah terhadap dokumen GDPK	timbulnya permasalaan kependudukan di daerah	OPD Provinsi/Kab /Kota
13	Sasaran Kegiatan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen profil pembangunan kependudukan.	belum tersedianya data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pihak	kurang optimalnya kualitas dan efektivitas dokumen yang dihasilkan	OPD Provinsi

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 - 19 tahun	Cakupan kegiatan pemberdayaan belum menjangkau keseluruhan kelompok PIK Remaja	Risiko Operasional	kurangnya kesadaran orangtua, budaya masyarakat yang masih mendukung pernikahan usia muda kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi Pengawasan/kontrol orangtua atau keluarga terhadap pergaulan anak keterbatasan anggaran	Peningkatan angka prevalensi stunting , AKI dan AKB rendahnya pemahaman remaja mengenai risiko kehamilan di usia anak	Anak
15	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelomppok UPPKA yang aktif	Tidak ada pendampingan bagi kelompok UPPKA sehingga kelompok menjadi vacum atau tidak aktif	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen dari OPD KB atau OPD terkait dalam pendampingan kelompok	Kelompok UPPKA menajdi vacum atau tidak aktif	Kelompok UPPKA
			Persentase kelomppok tribina yang aktif	Belum meratanya pengetahuan kader dalam pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia Tidak tersampaikannya materi kepada anggota kelompok atau sasaran keluarga balita, remaja dan lansia	Risiko Operasional	Belum semua kader mengikuti pelatihan pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia Ketidakaktifan anggota kelompok Tribina dan sasaran keluarga balita,	kapasitas kader dalam pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia masih rendah keluarga balita, remaja dan lansia tidak materi tentang pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia	Kelompok, anggota dan sasaran Tribina

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						remaja dan lansia tidak masuk dalam keanggotaan kelompok		
16	Sasaran Kegiatan	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi MKJP sehingga meningkatnya drop out KB	Risiko Operasional	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait KB MKJP	Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk	PUS
17	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Unmetneed KB	Kehamilan yang tidak diinginkan	Risiko operasional	**Norma sosial dan budaya**, seperti tekanan dari pasangan atau keluarga untuk tidak menggunakan kontrasepsi**.** **Kurangnya akses terhadap layanan kontrasepsi**, baik karena lokasi geografis, biaya.	**Beban sosial dan ekonomi keluarga** karena kehamilan yang tidak direncanakan	PUS
18	Sasaran Kegiatan	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	Petugas Input Data aplikasi SIGA pada kab/kota tidak optimal	Risiko Operasional	Belum semua petugas data mempunyai pemahaman yang benar terkait proses penginputan data pada aplikasi SIGA	Data pada Aplikasi SIGA tidak update dan validitasnya kurang	Petugas Data, Pengguna data

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Manipulasi bukti pembayaran, kuitansi, atau dokumen pendukung.	Risiko Fraud	Dorongan mencari keuntungan pribadi/kelompok (gratifikasi atau penggelapan)	Pegawai atau pihak terkait bisa dikenai tuntutan pidana korupsi, sanksi administratif, maupun pengembalian kerugian negara.	DP3AP2KB

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Program									
Hasil Rekomendasi Pengawasan APIP belum signifikan memperbaiki kinerja PUG di OPD	3	4	12	Ada	1. Rakor Pokja PUG Kabupaten/Kota/Provinsi 2. Workshop PUG OPD Provinsi 3. Konsultasi PUG 4. Penguatan PUG bagi Kabupaten/Kota 5. Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan PUG Sinergitas Pentahelix	Memadai	2	3	6
Pemkab dan Pemdes belum memfasilitasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan (misal pemasaran dan perijinan)	4	3	12	Ada	Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dengan 5 tahap	Memadai	3	2	6
Masih ada Pemerintah Kab/kota yang kurang berkomitmen dalam membentuk UPTD	2	4	8	Ada	1. Kegiatan Workshop penguatan kelembagaan penyedia layanan di Kab/Kota 2. Kegiatan Rapat Pertemuan penguatan kelembagaan bersama lembaga penyedia layanan	Memadai	-	-	-
Kabupaten/Kota tidak memiliki Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga	3	3	9	Tidak					
Belum terdapat renaksi pemenuhan hak anak di Kab/kota	4	3	12	Ada	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 2. Koordinasi Implementasi Pemenuhan Hak Anak 3. Fasilitasi dan Koordinasi Keterlibatan Dunia Usaha dalam	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemenuhan Hak Anak Jawa Tengah				
Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan	3	4	12	ada	1. Pelaksanaan FGD Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak 2. Rakor Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 3. Workshop Pencegahan dan Penanganan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Memadai	3	3	9
Komitmen Tim Penyusun GDPK Kab/kota masih rendah	2	4	8	Ada	Advokasi Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar	Memadai	2	3	6
Kurangnya komitmen Pemerintah Desa dalam meningkatkan peran kelompok kegiatan Kampung KB	2	4	8	Ada	Advokasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Memadai	2	3	6
Kehamilan yang tidak diinginkan meningkat yang berisiko stunting	3	4	12	Ada	1. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan KB MKJP 2. Percepatan Penurunan Stunting 3. Pengembangan Konten Media KIE	Memadai	3	3	9
Kurangnya pemahaman petugas data Kab/Kota dalam mengisi ketersediaan data gender dan anak	3	3	9	Ada	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak	Memadai	-	-	-
Pelaksanaan tingkat ketercapaian kinerja kurang dari target	3	3	9	Ada	1. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan 2. Konsultasi keterpaduan pusat dan daerah 3. Rapat Koordinasi Urusan PPPA dan Dalduk KB	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masyarakat Tidak puas terhadap pelayanan OPD	2	2	4	Ada	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Pelayanan Informasi 3. SOP Pelayanan Bantuan Korban Kekerasan	Memadai	2	2	4
Indikator Kegiatan									
Komitmen yang kurang dalam mengidentifikasi ARG	4	4	16	Ada	1. Rakor POKJA PUG OPD Provinsi 2. Workshop PUG OPD Provinsi 3. Konsultasi PUG 4. Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan PUG Sinergitas Pentahelix	Belum Memadai	4	3	12
Peserta tidak memahami Materi yang disampaikan	4	3	12	Ada	1. Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) 2. Workshop Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Jawa Tengah 3. Pengembangan UMKM Perempuan Berdaya Melalui Program Inkubasi 4. Sosialisasi Implementasi Serat Kartini	Memadai	3	3	9
Belum semua Kab/kota mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah perlindungan di setiap kecamatan	4	4	16	Ada	1. Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Rangka Pencegahan KtP dan TPPO 2. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtP dan TPPO	Belum Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					3. Kegiatan Workshop penguatan kelembagaan penyedia layanan di Kab/Kota 4. Kegiatan Rapat Pertemuan penguatan kelembagaan bersama lembaga penyedia layanan 5. TOT Fasilitator Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota 6. Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan				
Masih ada lembaga penyedia layanan yang belum menerapkan mekanisme layanan dan perlindungan perempuan sesuai standar	3	3	9	Ada	1. Kegiatan Workshop penguatan kelembagaan penyedia layanan di Kab/Kota 2. Kegiatan Rapat Pertemuan penguatan kelembagaan bersama lembaga penyedia layanan	Memadai	2	3	6
Data asesmen kasus rujukan kekerasan terhadap perempuan tidak lengkap	2	3	6	Ada	1. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3. Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi 4. layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsilayanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi 5. layanan kesehatan yang tidak dijaminBPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi 6. layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi				
Penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga di Kab/kota berjalan lambat dan kurang optimal sehingga program-program pembangunan kualitas keluarga di kab/kota kurang mendapatkan prioritas dukungan	3	3	9	Ada	1. edukasi dan sosialisasi peningkatan ketahanan keluarga di kab/kota 2. pendampingan implementasi kebijakan ketahanan keluarga di kab/kota	Memadai	3	2	6
Terdapat layanan keluarga yang meliputi edukasi, konsultasi dan konseling tidak terselenggara sesuai standar di kab/kota	3	3	9	Ada	1. edukasi dan sosialisasi peningkatan ketahanan keluarga di kab/kota	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					2. pendampingan implementasi kebijakan ketahanan keluarga di kab/kota				
Pemahaman Gugus Tugas KLA terhadap indikator penilaian kurang optimal	2	4	8	Ada	1. Bersurat kepada kepala daerah kab/kota terkait penilaian KLA 2. Koordinasi dan Pemantauan Capaian Pengembangan KLA 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Verifikasi KLA tingkat Provinsi	Memadai	2	3	6
Lembaga masyarakat dan Dunia Usaha belum sepenuhnya bersinergi dalam peningkatan kualitas hidup anak	4	2	8	Ada	Fasilitasi dan Koordinasi Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak Jawa Tengah	Memadai	3	2	6
belum semua kecamatan di kabupaten/kota yang mendukung terbentuknya rumah perlindungan anak	3	3	9	Ada	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi AMPK	Memadai	2	3	6
AMPK tidak mendapatkan layanan secara terpadu	2	3	6	Ada	1. Pelaksanaan Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK 2. FGD penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan AMPK 3. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi AMPK	Memadai	2	2	4
Data asesmen kasus rujukan kekerasan terhadap anak tidak lengkap	2	3	6	Ada	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Memadai	2	2	4
Pembangunan 5 pilar kependudukan belum dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah	2	4	8	Ada	1. Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas 2. Advokasi Pengembangan dan Penyelenggaraan Kampung	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak 3. Advokasi Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar 4. Advokasi Pendidikan Kependudukan dalam Rangka Sosialisasi Gerakan Jo Kawin Bocah serta Cegah AKI dan Stunting 5. Sosialisasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak				
belum tersedianya data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen	2	4	8	Ada	Advokasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU)	Memadai	2	3	6
Cakupan kegiatan pemberdayaan belum menjangkau keseluruhan kelompok PIK Remaja	4	3	12	Ada	1. Sosialisasi Penurunan Angka Stunting Melalui Kelompok BKB 2. Sosialisasi Penurunan Angka Stunting dan AKI Melalui Kelompok BKR 3. Workshop Advokasi Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Kelompok BK 4. Sosialisasi JKB melalui kelompok PIK remaja (buktikan dengan notulensi dll)	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak ada pendampingan bagi kelompok UPPKA sehingga kelompok menjadi vacum atau tidak aktif	3	3	9	Ada	1. Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Kelompok UPPKA 2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk dan Jaringan Usaha Kelompok UPPKA	Memadai	2	3	6
Belum meratanya pengetahuan kader dalam pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia serta Tidak tersampaikannya materi kepada anggota kelompok atau sasaran keluarga balita, remaja dan lansia	3	3	9	Ada	1. Sosialisasi Penurunan Angka Stunting Melalui Kelompok BKB 2. Sosialisasi Penurunan Angka Stunting dan AKI Melalui Kelompok BKR 3. Workshop Advokasi Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Kelompok BKL 4. Sosialisasi Kegiatan Tribina dan UPPKA dalam Upaya Penurunan Angka Stunting di Jawa Tengah 5. FGD Penyelenggaraan Kegiatan Tribina dan UPPKA di Jawa Tengah (Dalam Daerah)	Memadai	2	3	6
Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi MKJP sehingga meningkatnya drop out KB	4	3	12	Ada	1. Safari Pelayanan KB MKJP 2. Pengembangan Konten Media KIE 3. Penggerakan KB Pria Bersama Mitra 4. Advokasi Peningkatan Kesertaan KB Perusahaan	Memadai	3	3	9
Kehamilan yang tidak diinginkan	3	3	9	Ada	1. Advokasi Peningkatan Kesertaan KB Perusahaan 2. Pengembangan Konten Media KIE	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					3. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan KB MKJP				
Petugas Input Data aplikasi SIGA pada kab/kota tidak optimal	2	2	4	Ada	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak	Memadai	2	2	4
Manipulasi bukti pembayaran, kuitansi, atau dokumen pendukung.	3	4	12	Ada	1. Terapkan sistem arsip digital dan backup 2. Audit Internal kelengkapan dokumen secara berkala	Memadai	2	2	4

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Indikator Program				
Hasil Rekomendasi Pengawasan APIP belum signifikan memperbaiki kinerja PUG di OPD	12	Kepala Bidang KGPP	Kurang optimalnya kinerja APIP dalam melakukan pengawasan PUG di OPD	Pembangunan Daerah belum berorientasi pada isu gender
Pemkab dan Pemdes belum memfasilitasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan (misal pemasaran dan perijinan)	12	Kepala Bidang KGPP	Kurangnya komitmen Pemkab dan Pemdes	Perempuan yang difasilitasi pelatihan tidak menjdai wirausaha
Belum terdapat renaksi pemenuhan hak anak di Kab/kota	12	Kepala Bidang PHPA	Belum ada mekanisme evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas KLA	IPHA tidak mencapai target
Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan	12	Kepala UPTD PPA	Kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Tidak terpenuhinya hak anak atas perlindungan
Kehamilan yang tidak diinginkan meningkat yang berisiko stunting	12	Kepala Bidang KBKIE	Kurangnya Advokasi sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan KB Modern	Menurunnya Kualitas hidup ibu dan anak
Indikator Kegiatan				
Komitmen yang kurang dalam mengidentifikasi ARG	16	Kepala Bidang KGPP	Pergantian personil yang menangani ARG sering terjadi	Nilai Evaluasi PUG tidak mencapai target
Peserta tidak memahami Materi yang disampaikan	12	Kepala Bidang KGPP	Metode penyampaian materi kurang tepat	Peserta tidak meningkat pemahamannya
Belum semua Kab/kota mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah perlindungan di setiap kecamatan	16	Kepala Bidang KGPP	Kebijakan masih baru sehingga belum ada kesiapan sumber daya di kecamatan	Kecamatan belum mempunyai Rumah Perlindungan Perempuan
Cakupan kegiatan pemberdayaan belum menjangkau keseluruhan kelompok PIK Remaja	12	Kepala Bidang Daldukks	kurangnya kesadaran orangtua, budaya masyarakat yang masih mendukung pernikahan usia muda kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi	Peningkatan angka prevalensi stunting , AKI dan AKB

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi MKJP sehingga meningkatnya drop out KB	12	Kepala Bidang KBKIE	Pengawasan/kontrol orangtua atau keluarga terhadap pergaulan anak Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait KB MKJP	Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk
Manipulasi bukti pembayaran, kuitansi, atau dokumen pendukung	12	Sekretaris	Dorongan mencari keuntungan pribadi/kelompok (gratifikasi atau penggelapan)	Pegawai atau pihak terkait bisa dikenai tuntutan pidana korupsi, sanksi administratif, maupun pengembalian kerugian negara.

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Program/ Kegiatan PD	Indikator Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program								
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	Hasil Rekomendasi Pengawasan APIP belum signifikan memperbaiki kinerja PUG di OPD	12	Kurang optimalnya kinerja APIP dalam melakukan pengawasan PUG di OPD	Pembangunan Daerah belum berorientasi pada isu gender	Pembahasan kinerja APIP dalam pengawasan PUG pada rapat internal Pokja PUG Provinsi	Kepala Bidang KGPP	Semester II Tahun 2026
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	Pemkab dan Pemdes belum memfasilitasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan (misal pemasaran dan perijinan)	12	Kurangnya komitmen Pemkab dan Pemdes	Perempuan yang difasilitasi pelatihan tidak menjdai wirausaha	1. Melakukan Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengintervensi permasalahan dalam pemberdayaan perempuan 2. Melakukan koordinasi dengan kab/kota dan pemdes dalam pemberdayaan perempuan untuk berwirausaha	Kepala Bidang KGPP	Semester II Tahun 2026
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Belum terdapat renaksi pemenuhan hak anak di Kab/kota	12	Belum ada mekanisme evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas KLA	IPHA tidak mencapai target	Pendampingan dan monitoring ke Kab/kota (data dukung dilampirkan)	Kepala Bidang PHPA	Semester II Tahun 2026
Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan	12	Kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Tidak terpenuhinya hak anak atas perlindungan	1. Pelaksanaan FGD Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak	Kepala UPTD PPA	Semester II Tahun 2026

Program/ Kegiatan PD	Indikator Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Kehamilan yang tidak diinginkan meningkat yang berisiko stunting	12	Kurangnya Advokasi sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan KB Modern	Menurunnya Kualitas hidup ibu dan anak	2. Rakor Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 3. Workshop Pencegahan dan Penanganan Anak yang memerlukan perlindungan khusus 1. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan KB MKJP 2. Percepatan Penurunan Stunting 3. Pengembangan Konten Media KIE	Kepala Bidang KBKIE	Semester II Tahun 2026
Kegiatan								
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Nilai Evaluasi PUG Provinsi	Komitmen yang kurang dalam mengidentifikasi ARG	16	Pergantian personil yang menangani ARG sering terjadi	Nilai Evaluasi PUG tidak mencapai target	Mendorong OPD untuk memberdayakan focal point PUG	Kepala Bidang KGPP	Semester II Tahun 2026
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya	Peserta tidak memahami Materi yang disampaikan	12	Metode penyampaian materi kurang tepat	Peserta tidak meningkat pemahamannya	Mengganti metode sosialisasi dalam bentuk brainstorming	Kepala Bidang KGPP	Semester I Tahun 2026
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan	Belum semua Kab/kota mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah perlindungan di setiap kecamatan	16	Kebijakan masih baru sehingga belum ada kesiapan sumber daya di kecamatan	Kecamatan belum mempunyai Rumah Perlindungan Perempuan	Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani di level kecamatan	Kepala Bidang KGPP	Semester I Tahun 2026
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 - 19 tahun	Cakupan kegiatan pemberdayaan belum	12	kurangnya kesadaran orangtua, budaya masyarakat yang masih	Peningkatan angka prevalensi stunting , AKI dan AKB	Koordinasi dengan OPD KB Kab/Kota untuk melakukan	Kepala Bidang Daldukks	Semester I Tahun 2026

Program/ Kegiatan PD	Indikator Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		menjangkau keseluruhan kelompok PIK Remaja		mendukung pernikahan usia muda kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi Pengawasan/kontrol orangtua atau keluarga terhadap pergaulan anak		advokasi kepada semua PIK Remaja di Kab/Kota		
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi MKJP sehingga meningkatnya drop out KB	12	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait KB MKJP	Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk	Safari Pelayanan KB MKJP	Kepala Bidang KBKIE	Semester I Tahun 2026
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Manipulasi bukti pembayaran, kuitansi, atau dokumen pendukung	12	Dorongan mencari keuntungan pribadi/kelompok (gratifikasi atau penggelapan)	Pegawai atau pihak terkait bisa dikenai tuntutan pidana korupsi, sanksi administratif, maupun pengembalian kerugian negara.	1. Sosialisasi Anti Korupsi dan kampanye anti Gratifikasi 2. Terapkan sistem arsip digital dan backup 3. Audit Internal kelengkapan dokumen secara berkala	Sekretaris	Semester I Tahun 2026

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk mendapatkan pangan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 Undang - Undang Dasar 1945. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Tidak tersedianya pangan akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi belum lagi gejolak sosial dan politik yang terjadi pada masyarakat karena ketahanan pangan yang terganggu. Berdasarkan pasal 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
2. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
3. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Pembangunan ketahanan pangan selaras dengan salah satu ASTA CITA Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2025-2029 yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru”, serta salah satu misi Gubernur Jawa Tengah terpilih yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan”. Dalam membangun ketahanan pangan di Jawa Tengah yang mana diukur dengan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan Indek Ketahanan Pangan (IKP). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan angka PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktivitas yang dilakukan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) didukung oleh 3 aspek, yaitu Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan / Akses Pangan, serta Pemanfaatan Pangan. Adapun penjabaran ketiga aspek tersebut adalah:

1. **Ketersediaan Pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan;
2. **Akses Pangan** adalah kemampuan kelompok, rumah tangga atau individu untuk memenuhi kecukupan pangan setiap saat baik dari produksi sendiri,

pembelian, pemberian/bantuan lain berdasarkan sumber daya (sosial, teknologi, finansial/keuangan, alam, manusia) yang dikuasai secara berkelanjutan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat;

3. **Pemanfaatan Pangan** adalah proses penggunaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia, baik untuk konsumsi langsung maupun dalam bentuk produk olahan. Selain itu, pemanfaatan pangan juga mencakup upaya untuk mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan pangan dengan cara yang efisien agar bisa bertahan lebih lama dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029. Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di mana di dalamnya terdapat penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: (1) Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir, dan (6) Penetapan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 – 2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang timbul. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 ;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud:

a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029.
b. Memberikan pedoman dalam menyusun RENJA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 disusun dengan tujuan:

a. Mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra DISHANPAN dengan RPJMD 2025 – 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
c. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan urusan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 (lima) Bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Bab ini memaparkan peran (tugas dan fungsi) Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra pada periode ini. Serta uraian tentang identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, kemudian ditelaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Serta strategi sebagai rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, bersifat operasional dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.

Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Serta memuat indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator program yang telah dirumuskan pada Bab IV.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Organisasi DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 6 (enam) Pejabat Administrator yang dibantu oleh 2 atau 3 Pejabat Pengawas sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Sedangkan Organisasi UPT pada DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah terlihat pada Gambar 2.2.

DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan perumusan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur seuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

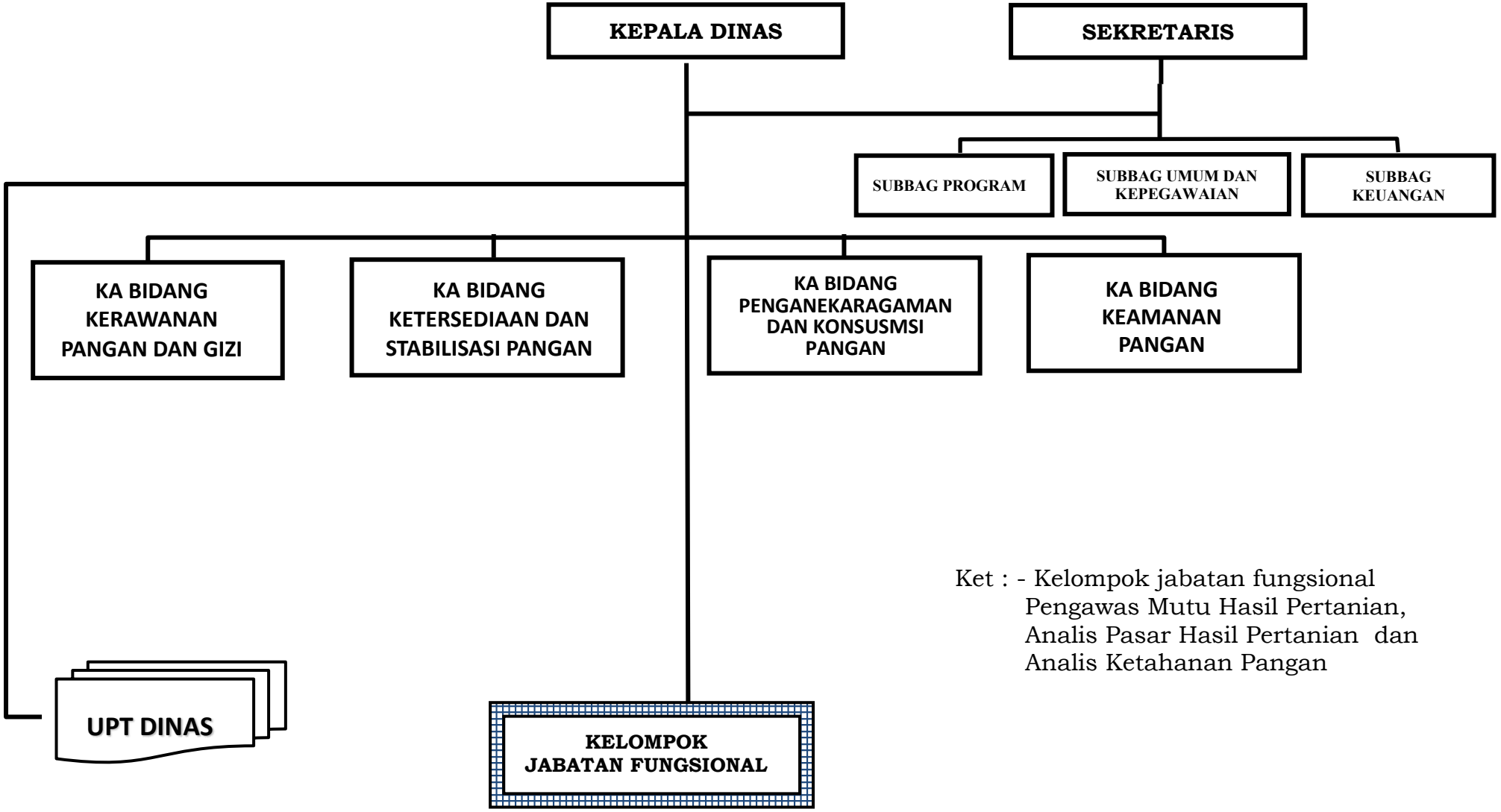

Ket : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Analis Ketahanan Pangan

Gambar 2.2.
Struktur Organisasi UPT Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan (BMSP) Provinsi Jawa Tengah

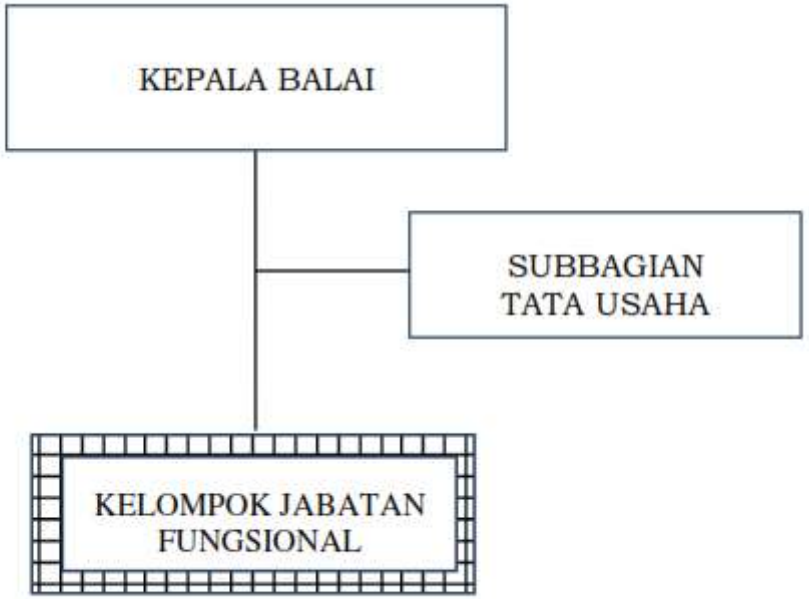

Tugas pokok dan fungsi setiap bidang, sekretariat dan UPT adalah sebagai berikut.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, sebagaimana tersebut diatas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
e. Penyiapan bahan perumusan e
f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

b. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

C. Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan;
b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan

Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal, bidang pengembangan konsumsi

pangan beragam bergizi seimbang dan aman, bidang promosi penganekaragaman pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal;
b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman;
c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganekaragaman pangan dan;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Keamanan Pangan

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama Keamanan Pangan.

Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan;
c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama keamanan pangan; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan Kelas A

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan di bidang peningkatan mutu dan keamanan pangan.

Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan Kelas A, mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengujian Pangan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;

b. Pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian pangan, sertifikasi mutu dan keamanan pangan;
c. Pelaksanaan teknis operasional sertifikasi organik;
d. Evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian Pangan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
e. Pengelolaan ketatausahaan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi Sub Bagian Tata dan Kelompok Jabatan Fungsional.

a. **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

A. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 86 orang. Terdiri dari 7 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III, 3 orang eselon IV, 8 Sub Koordinator dan 51 jabatan fungsional umum dan 28 orang staf fungsional tertentu, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 2.3.).

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Desember 2024 sebagai berikut:

Gambar 2.3.
ASN Berdasar Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Desember 2024

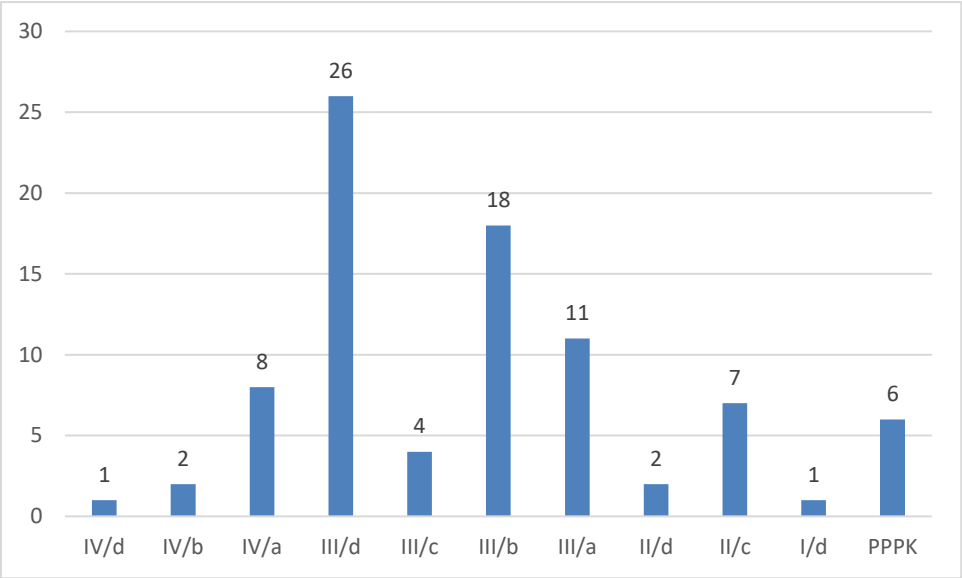

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.4.
Tingkat Pendidikan ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Desember 2024

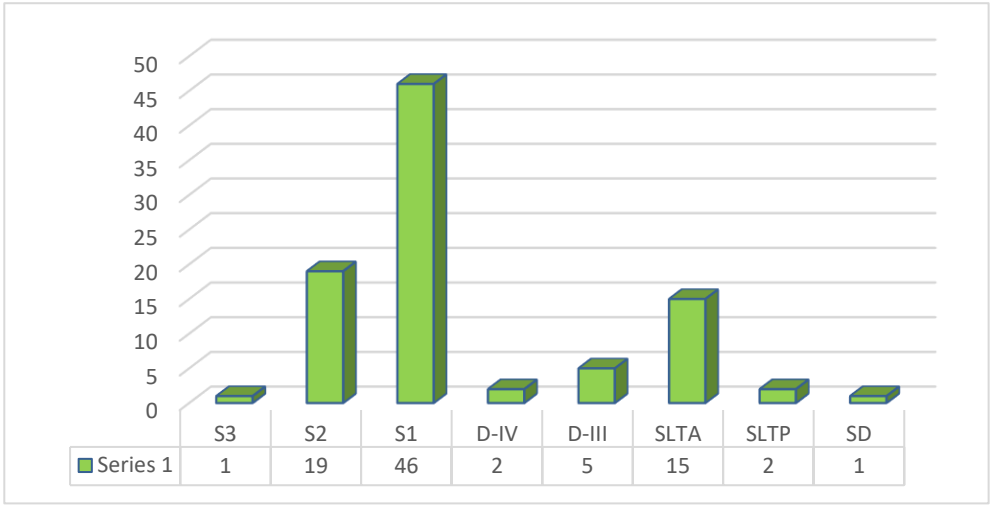

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2024

B. Sarana dan Prasarana (Aset)

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Bangunan gedung kantor 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, gedung pertemuan/aula besar kapasitas kurang lebih 150 orang, Ruang rapat kecil 2 buah dengan kapasitas masing-masing kurang lebih 30 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, gedung kantor gudang cadangan pangan 1 (satu), 1 (satu) gedung eks. Toko Tani Indonesia Center (TTIC), gudang cadangan pangan pemerintah 2 unit dan lantai jemur (kapasitas 10 ton GKG), 2 unit gedung laboratorium (Ungaran dan Solo), 1 unit bangunan kantor (BPMKP Solo), 1 unit aula, 1 unit musholla, 9 unit rumah dinas;
2. Personal komputer sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit, 54 (lima puluh empat) unit laptop, 22 (dua puluh dua) UPS, dan 52 (lima puluh dua) printer;
3. 12 (dua belas) jaringan mesin telepon/fax dengan rincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159, 6925268, 6924604 dan (0271) 851375;
4. Televisi sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
5. Sebanyak 57 (lima puluh tujuh) AC split, 5 (lima) AC floor, 2 (dua) AC cassette dan 15 (lima belas) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan, dimana 8 (delapan) unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan;
6. LCD sebanyak 16 (enam belas) unit, 6 unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan, Camcorder DVD 1 (satu) unit;
7. Kendaraan dinas roda 4 (mobil) sebanyak 16 (enam belas) unit;
8. Kendaraan roda 2 (Sepeda motor) sebanyak 16 (enam belas) unit, di mana 8unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan aset;
9. Rice Mill Unit (RMU) 3 (tiga) unit, dryer/pengering 1 (satu) unit, Cold Storage 1 (satu) unit;

10. 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 326 unit peralatan laboratorium (Solo dan Ungaran);
11. Alat Pemotong Kertas 2 (dua) unit; Video Conference 1 (satu) unit, kursi rapat besi 70 (tujuh puluh), kursi eselon 5 (lima), televisi 4 (empat), dispenser 3 (tiga), bracket TV 3 (tiga), meja rapat 31 (tiga puluh satu), meja rapat pimpinan 2 (dua), genset kapasitas 140 KVA 1 (satu), UPS computer 3 (tiga), pallet plastik 30 (tiga puluh), router 1 (satu) set, Lemari es 1 (satu), Camera digital 1 (satu), CCTV 2 paket, Drone 1 (satu), Kursi putar staf 23 (dua puluh tiga), kursi hadap 2 (dua), Sound system gedung pertemuan baru 1 (satu) paket, Microphone kabel 2 (dua), microphone wireless 2 (dua), Sound system podcast 1 (satu) paket;
12. Pada BPMKP terdapat Filing Cabinet 1 (satu), Vacum Cleaner 1 (satu), AC split 4 (empat), UPS 10.000 VA Laboratorium BPMKP 1 (satu), Compressor Swan 1 (satu), Hand Blender Philips 1 (satu), Graphite Furnace 1 (satu), Lemari Pendingin/Kulkas 2 Pintu Samsung 1 (satu), Testing Milling Crown CTM-18 1 (satu), Micropipette 100-1000ul 1 (satu), Peralatan Laboratorium Set Toolkit 1 (satu), Rak Pengering Glassware 1 (satu).

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui evaluasi kinerja tahun 2020-2024 dimana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi pelaksana urusan pangan pada kurun waktu tersebut. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian dari target akhir Renstra yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan pada matrik pengukuran pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari 10 (sepuluh) indikator kinerja *outcome*, 4 (empat) indikator tercapai 100% yaitu **Rasio Cadangan Pangan Masyarakat, Rasio Cadangan Pangan Masyarakat (DRP), Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah, Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP),** 6 (enam) indikator melebihi target antara lain **Rata-rata Ketercukupan Pangan, Rasio Penyediaan Cadangan pangan pemerintah provinsi, Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku, Persentase penurunan**

daerah rawan pangan dan gizi, Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan.

Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 menjadi landasan bagi penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Secara rinci disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	Renstra PD Tahun 2018-2023																			
01.00	Tujuan PD																			
	Skor PPH Konsumsi	Angka				87,72	88.08.00	88,44	88,8		87,1	86,67	94,4	94,2		98,8	98,4	106,74	106,08	
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka				70	70	78	76		81,94	81,15	89,5	91,5		115,93	116,43	114,75	120,4	
02.00	Sasaran PD																			
	PPH Ketersediaan	Angka				82,75	83	N/A	N/A		82,87	85,84	N/A	N/A		100,15	103,42	N/A	N/A	
	Angka Konsumsi Energi	Kkal/Kap/Hari				2150	2150	2100	2100		2048	2054	2018	2025		95,26	95,54	96,1	96,43	
	Angka Konsumsi Protein	Gram/Kap/Hari				57	57	N/A	N/A		59,9	60,24	N/A	N/A		105,09	105,69	N/A	N/A	
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka				70	70	78	76		81,94	82,75	88,75	80		117,06	118,21	113,79	105,27	
	Nilai SAKIP PD	Angka				80	80	80,01	80,02		89,67	89,73	89,64	85,05		112,09	112,17	112,04	106,29	
03.00	Program																			
	Ketersediaan Protein Pangan Beragam dan berkualitas	Gram/Kap/Hari				87,8	88	N/A	N/A		87,97	98,17	N/A	N/A		100,19	111,56	N/A	N/A	
	Ketersediaan Energi Pangan Beragam dan berkualitas	Kkal/Kap/Hari				3730	3735	3731	4020		3732	3736	3797	4021		100,05	100,03	101,77	100,02	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	CV Harga Pangan Strategis Beras	%				5	5	4,5	2		1,1	0,57	2,14	0,58		454,55	877,19	210,28	344,83	
	CV Harga Pangan Strategis Bawang Merah	%				28	27	N/A	N/A		23,53	9,47	N/A	N/A		119	285,11	N/A	N/A	
	CV Harga Pangan Strategis Cabai	%				43	42	N/A	N/A		49,3	17,01	N/A	N/A		87,22	246,91	N/A	N/A	
	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	%				100	100	N/A	N/A		100	100	N/A	N/A		100	100	N/A	N/A	
	Rasio Cadangan Pangan Masyarakat Kebutuhan Pangan	Angka				0,5	0,6	0,61	1		0,51	0,6	2,41	1,03		102	100	395,08	103	
	Rasio Konsumsi Pangan Lokal	Angka				0,12	0,13	N/A	N/A		0,15	0,16	N/A	N/A		125	123,08	N/A	N/A	
	Konsumsi Pangan Beras	Kg/Kapita/Tahun				98,8	98,5	92,3	91,4		88,8	88,48	87,9	88,6		111,26	111,32	105	103,16	
	Konsumsi Kelompok Buah dan Sayur	Kg/Kapita/Tahun				84	85	N/A	N/A		90,6	86,88	N/A	N/A		107,86	102,21	N/A	N/A	
	Konsumsi Kelompok Pangan Hewani	Kg/Kapita/Tahun				31	32	N/A	N/A		32,8	33,51	N/A	N/A		105,81	104,72	N/A	N/A	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar	%				90	90	80	80		97	90	80,79	86,38		107,78	100	100,99	107,98	
	Persentase Jaminan Mutu Pangan yang Diberikan	%				80	80	80	80		85,15	98,68	90,76	100		106,44	123,36	113,45	125	
	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%				85	85	1	1		85,71	85	58,73	52,56		100,84	100	5873	5256	
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan PD	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan PD	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
B.	Renstra PD Tahun 2024-2026																			

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01.00	Tujuan PD																			
	Indeks Ketahanan Pangan	Skor								83					85,34					102,8193
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka								82					80,85					98,6
2	SASARAN PD																			
	Angka Kecukupan Energi	Kkal/kapita/hari								3797					3805					100,2107
	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	%								10					6,86					145,7726
	Persentase penanganan kecamatan rawan pangan	%								5					10,81					216,2
	Skor PPH provinsi	Skor								94,5					93,6					99,04762
	Indeks Manajemen Risiko	Angka								2,95					3,09					104,75
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka								82					91					110,98
3	PROGRAM																			
	Rata-rata ketercukupan pangan	Angka								1,25					2					160

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka								0,064					0,65					1015,625
	Rasio cadangan pangan masyarakat	Angka								0,62					0,8					129,0323
	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%								60					84					140
	Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	Angka								0,62					0,8					129,0323
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun								87,8					87,8					100
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/kapita/tahun								87,8					87,8					100
	Persentase penurunan daerah rawan	%								0,01					0,12					1200

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	pangan dan gizi																			
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%								80					94,59					118,2375
	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan	%								80					91					113,75
	Persentase tingkat Ketercapaian Perangkat Daerah	%								100					100					100
	Persentase tingkat Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase tingkat Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	%								100					100					100

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	APBD pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	BELANJA DAERAH	34.546.475	35.465.015	43.528.909	53.930.596	39.805.906	33.144.893	32.720.123	41.632.036	52.582.331	38.747.206	95,94	92,26	95,64	97,50	97,34	41,45	39,76
2	BELANJA OPERASI	33.491.275	34.724.493	40.030.709	52.055.296	36.919.956	32.191.913	31.985.606	38.178.051	50.744.537	36.060.597	96,12	92,11	95,37	97,48	97,67	39,44	37,83
3	BELANJA MODAL	1.055.200	740.522	3.498.200	1.875.300	2.885.950	952.980	734.517	3.453.985	1.837.794	2.686.608	90,31	99,19	98,74	98,00	93,09	201	193
4	TOTAL BELANJA	34.546.475	35.465.015	43.528.909	53.930.596	39.805.906	33.144.893	32.720.123	41.632.036	52.582.331	2.686.608	95,94	92,26	95,64	97,50	97,34	41,45	39,76

2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di daerah, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis, baik dari aspek internal maupun eksternal.

Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintah bidang pangan, dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tanggung jawab penting untuk mengawal tiga pilar utama ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan (akses) pangan, dan pemanfaatan pangan. Namun, dalam implementasinya di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat optimalisasi tugas dan fungsi tersebut

Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Jawa Tengah tersaji pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Perwujudan Ketahanan	Belum Tersedianya Pangan Secara	Belum Sepenuhnya Kebutuhan Pangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pangan di Jawa Tengah	Mandiri di Jawa Tengah	Tercukupi Dari Produksi Jawa Tengah
			Masih Tingginya Ketergantungan Terhadap Impor Komoditas Pangan
			Belum Optimalnya Pengelolaan Cadangan Pangan di Jawa Tengah
			Masih Tingginya Ketergantungan Pada Bahan Pangan Tertentu
		Belum Optimalnya Keterjangkauan Pangan Masyarakat di Jawa Tengah	Fluktuasi Harga Pangan
			Masih Adanya Daerah Dengan Status Rawan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah
		Belum Optimalnya Pemanfaatan Pangan di Jawa Tengah	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Jawa Tengah Belum B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)
			Masih Adanya Pangan yang Belum Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan

2.5 Isu-Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (DISHANPAN) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Permasalahan yang sedang dihadapi pada aspek ketersediaan, masih terdapat beberapa komoditas pangan utama yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun pada aspek keterjangkauan, beberapa komoditas bahan pangan masih mengalami fluktuasi harga. Selain itu masih terdapat kecamatan dan desa di Jawa Tengah yang termasuk dalam

kategori rentan pangan. Selanjutnya pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antar kelompok pangan.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan selain mengacu pada Badan Pangan Nasional, pemilihan isu strategis juga memperhatikan kondisi di Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat berdasarkan pada prinsip Aktual, Problematik, Khalayak dan Layak (APKL) serta berdasarkan prioritas mendesak, serius dan bila tidak ditangani akan menjadi masalah (Urgent, Serious and Growth).

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

   Adalah Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Hasil dari perhitungan PoU Provinsi Jawa Tengah terhitung tinggi di Pulau Jawa hal ini dikarenakan perhitungan susenas dimulai pada pandemi (Maret 2020) sedangkan pembatasan serentak dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020. Bagi Provinsi Jawa Tengah yang merupakan Provinsi Penyangga Lumbung Pangan Nasional hal ini bukan suatu indikator yang baik. Oleh karena itu diperlukan pendekatan-pendekatan strategis guna menurunkan Persentase PoU di Provinsi Jawa Tengah. Berikut data time series persentase PoU di Jawa Tengah:

Gambar 2.5
Persentase PoU di Pulau Jawa 2020-2024

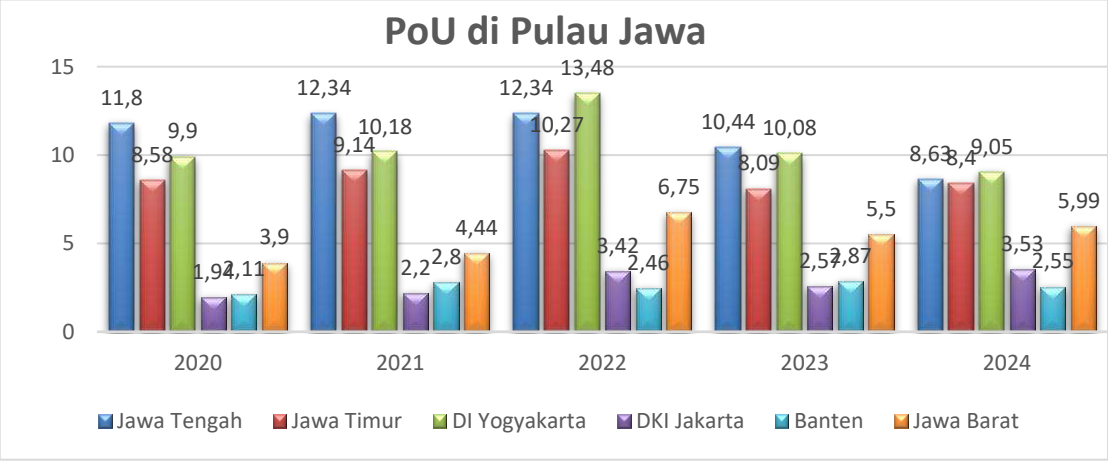

2. Ketersediaan pangan

Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Jawa Tengah secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Jawa Tengah. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.

Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Jawa Tengah surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stok beras.

Ketersediaan pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

Tabel 2.4
Angka Proyeksi Kebutuhan Beras

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Konsumsi Beras (Kg/Kap/Tahun)	Kebutuhan Konsumsi Beras (Kg/Tahun)
2020	36.516.035	97,19	3.549.096.904
2021	36.742.501	107,67	3.956.003.845
2022	37.032.410	106,21	3.933.150.545
2023	37.540.962	106,89	4.012.715.887
2024	37.892.283	102,84	3.896.936.219
2025	38.233.933	102,52	3.919.836.853
2030	39.771.480	101,44	4.034.340.020
2035	41.008.230	101,17	4.148.843.188
2040	41.939.540	101,65	4.263.346.356
2045	42.585.400	102,80	4.377.849.524

Gambar 2.6
Perbandingan Persentase Peningkatan jumlah penduduk, Kebutuhan Beras dan Angka Konsumsi Beras

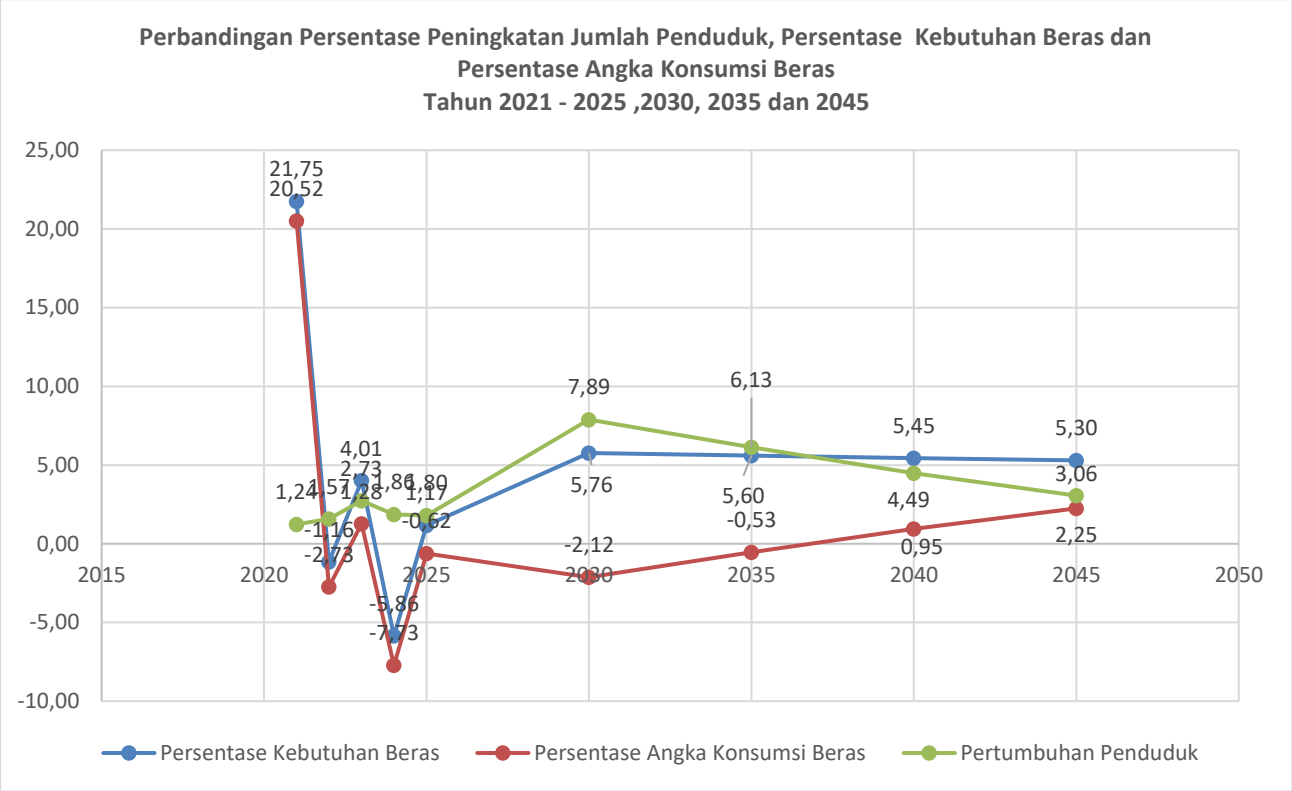

3. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Siang Gratis atau "Makan Bergizi Gratis" (MBG) yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran secara resmi telah dibahas dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Pada saat kajian ini ditulis, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) dan tim transisi Prabowo-Gibran menetapkan besaran anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun pada tahap pertama di tahun 2025. Besaran ini dinilai telah memperhitungkan target defisit fiskal sebesar 2.29% - 2.82%.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tentu adalah program yang berdampak positif bagi masyarakat, sebagaimana yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa program Makan Gratis adalah tujuan utamanya untuk meningkatkan gizi anak dan ibu hamil. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi untuk menyelesaikan masalah fundamental Indonesia, khususnya masalah stunting pada anak. Dalam visi misinya, program Makan Siang Gratis termasuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

4. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

Tabel 2.5
Penyediaan CPPD DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021-2025

Tahun	CPPD Yang Disediakan (beras) Ton
2021	198
2022	497,52
2023	410,45
2024	581,18

Gambar 2.7
Persaentase Kenaikan CPPD
DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah
Dari Tahun 2022-2024

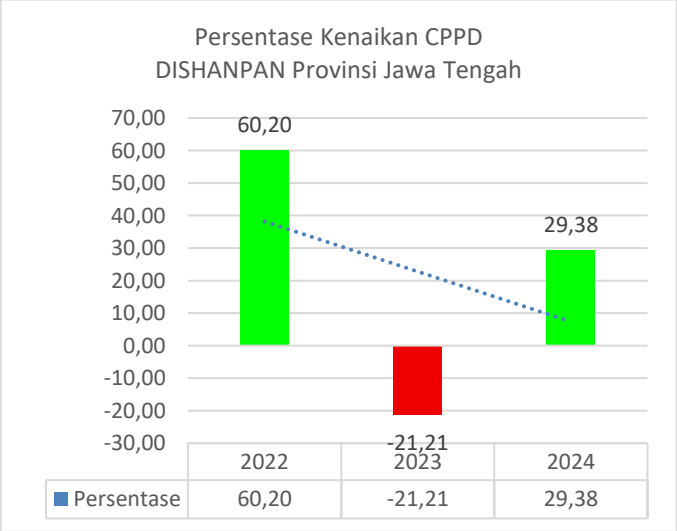

5. Distribusi dan Sistem Logistik Daerah

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana

distrbusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

6. Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah.

Tabel 2.6
Jumlah Kecamatan Rawan Pangan Prioritas 1,2 dan 3
Tahun 2020-2024

Tahun	Rawan Pangan		
	P1	P2	P3
2020	3	12	13
2021	31	51	107
2022	5	27	46
2023	2	15	20
2024	2	11	11

Gambar 2.8
Jumlah Kecamatan Rawan Pangan Prioritas 1,2 dan 3
Tahun 2020-2024

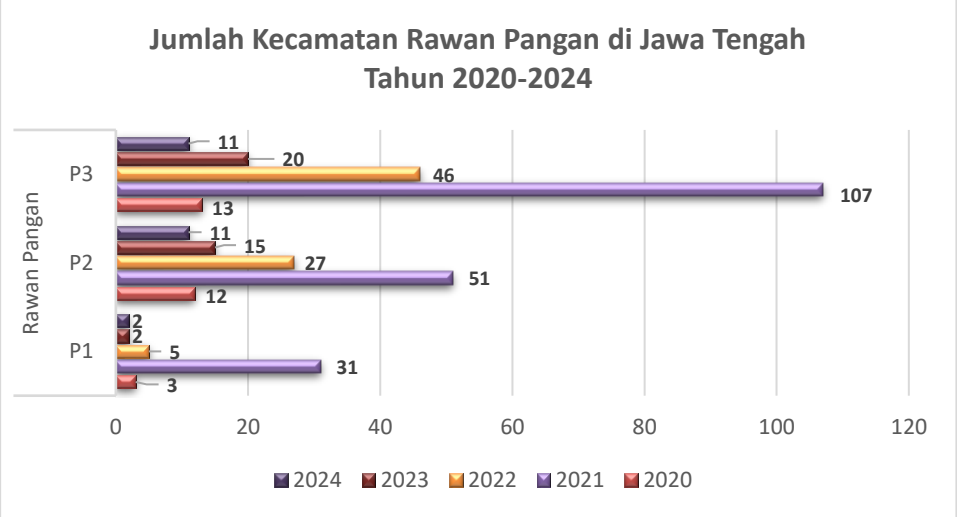

7. Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat jawa tengah belum optimal yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan

Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan di masyarakat antara lain : Permasalahan ekonomi yang menyebabkan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang berkualitas; Kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA); hingga Pergeseran budaya konsumsi pangan masyarakat kearah pangan praktis dan siap saji.

Peningkatan kualitas pola konsumsi pangan masyarakat jawa tengah sesuai kaidah B2SA berbasis pangan lokal dapat mengungkit taraf kesehatan masyarakat sekaligus mengembangkan ekosistem pangan yang lebih tahan dengan mengoptimalkan potensi lokal yang ada.

Tabel 2.7
Capaian Skor PPH Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021-2024

Tahun	Skor PPH	Target
2021	86,67	80,08
2022	94,4	88,44
2023	94,2	88,8
2024	93,6	94,5

Gambar 2.9
Capaian Skor PPH Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021-2024

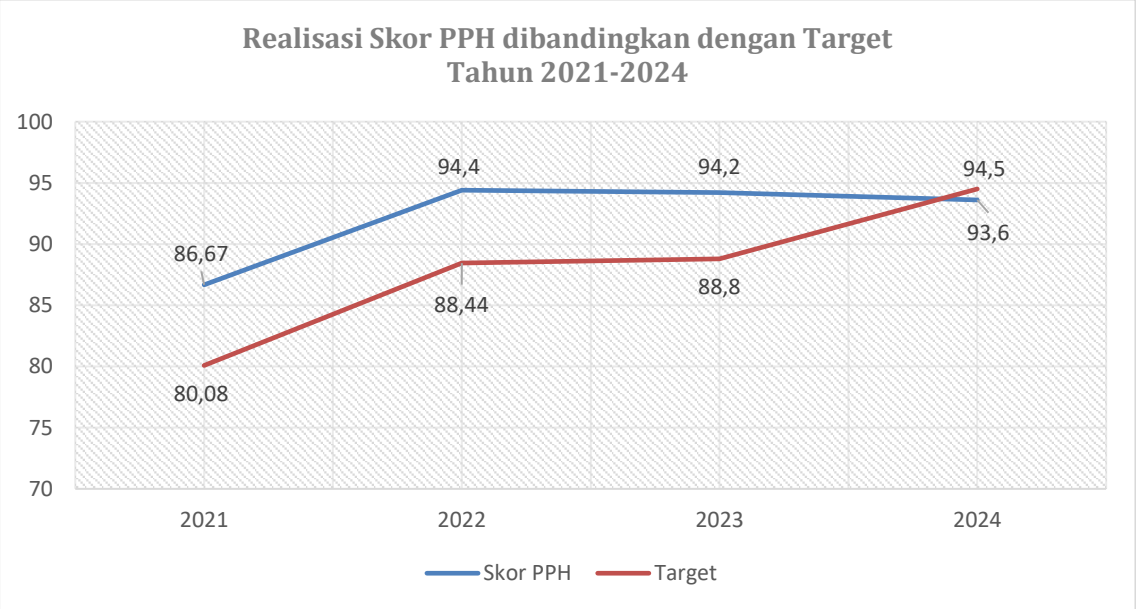

8. Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

Tabel 2.8
Capaian Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	90	90	100
2022	80	80,79	100,99
2023	80	86,38	107,98
2024	80	94,59	118,24

Gambar 2.10
Capaian Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
Tahun 2021-2024

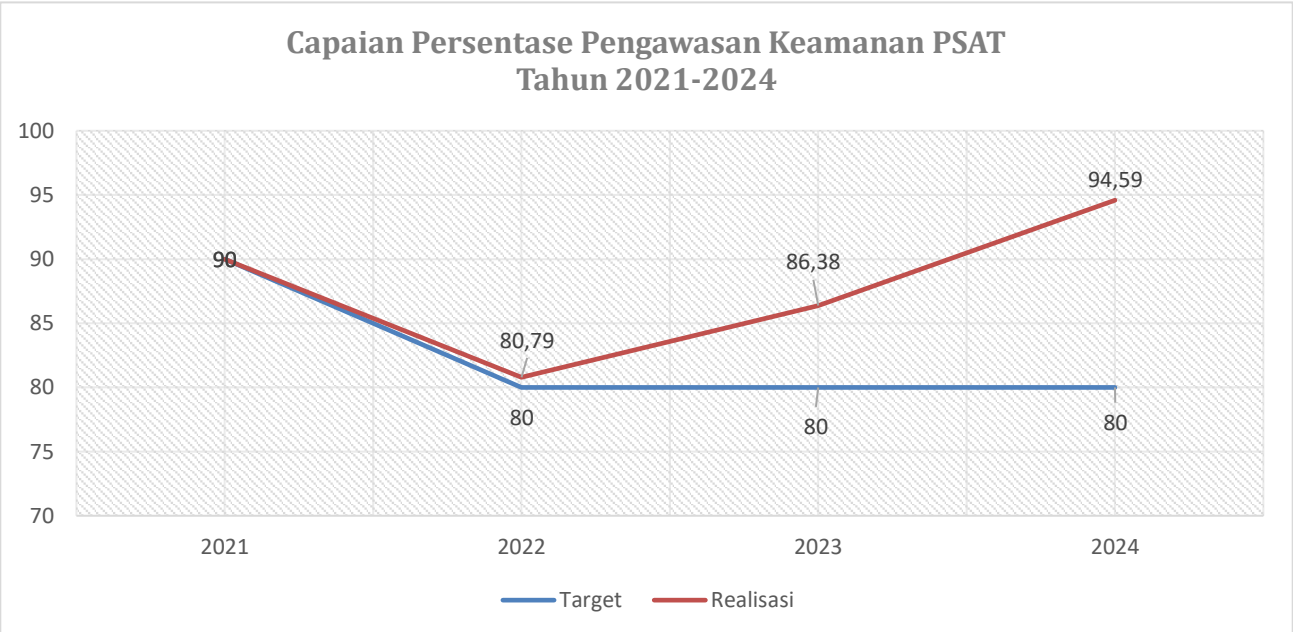

9. Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

   Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan , yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Ketahanan Pangan melalui OKKP-D dalam hal sertifikasi jaminan mutu pangan, baik dalam hal sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas.

10. Stunting

    Stunting merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada ibu selama kehamilan atau pada anak saat sedang dalam masa pertumbuhan. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

    Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya. Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Tengah menurut data SSGI dan SKI dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan sebesar 7% dari 27,7% menjadi 20,7%. Data penurunan prevalensi Stunting tertera pada tabel:

Tabel 2.9
Persentase *Stunting* di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Tahun				
	2019	2021	2022	2023	2024
1	27,7	20,9	20,8	20,7	17,1

Gambar 2.11
Persentase *Stunting* di Jawa Tengah Tahun 2019, 2021-2024

11. Food Loss and Waste

Food loss atau susut pangan adalah bahan pangan yang terbuang dalam rantai pasok dari petani ke pasar. Ini bisa terjadi akibat distribusi dan pengemasan yang tidak baik hingga membuat bahan pangan rusak dan tidak bisa dijual. Sementara, food waste atau limbah pangan terjadi di ingkat pasar ritel hingga di ingkat konsumen. Pangan terbuang akibat tidak laku ataupun penyia-nyiaan di rumah tangga. Food loss dan food waste Indonesia itu terbesar ke-3 di dunia setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Menurut Laporan Bappenas 2021, food loss dan food waste Indonesia selama 2000 – 2019 mencapai 150 – 184 kg perkapita pertahun yang seharusnya bisa memberi makan 30% – 40% populasi.

Tabel 2.10
Jumlah Timbunan Sampah dan Sampah Sisa Makanan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Timbunan Sampah	Sampah Pangan Sisa Makanan

2020	4.236.201,25	1.674.993,974
2021	5.021.888,22	1.840.019,844
2022	5.904.061,1	2.479.115,256
2023	5.730.084,22	2.245.046,997
2024	3.530.896,21	1.419.773,366

Gambar 2.12

Grafik Persentase Sampah Pangan Sisa Makanan Dibanding Dengan Timbunan Sampah di Jawa Tengah Tahun 2020-2024

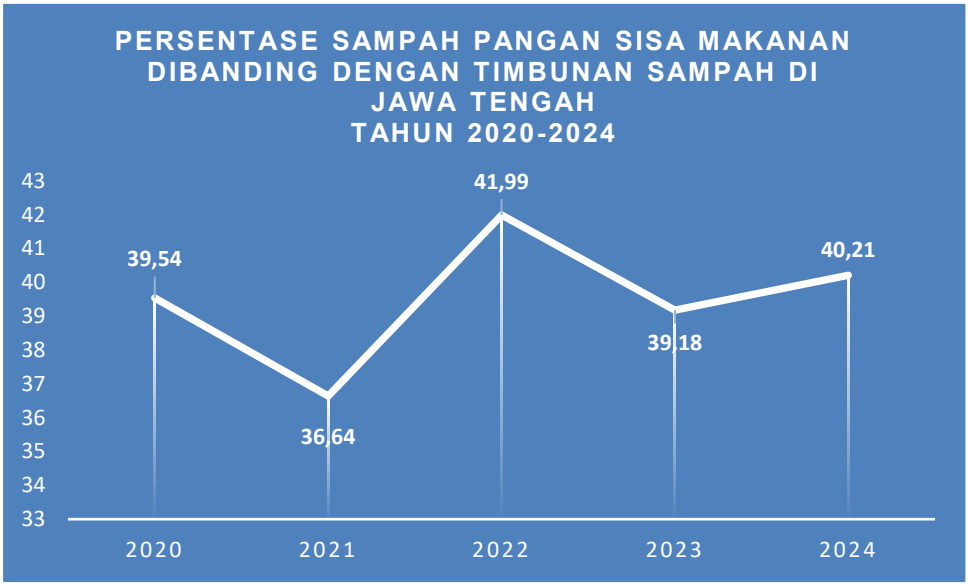

12. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi di sekitar 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Koperasi ini direncanakan akan diresmikan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari

Koperasi Indonesia. Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.

- Tujuan utama dari pembentukan Kopdes Merah Putih adalah:
  - Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa**:** Dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau, serta memfasilitasi pemasaran produk lokal.
  - Mengatasi Jeratan Pinjaman Online dan Rentenir: Memberikan alternatif pendanaan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.
  - Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa: Menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.
- Pembentukan Kopdes Merah Putih didasarkan pada beberapa regulasi dan kebijakan pemerintah, antara lain:
  - Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025: Mengatur tata cara pembentukan Kopdes Merah Putih, termasuk tahapan sosialisasi, musyawarah desa, dan pengesahan badan hukum koperasi.
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: Menjadi dasar hukum bagi pembentukan koperasi di Indonesia, yang mengutamakan asas kekeluargaan dan prinsip-prinsip koperasi.
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Memberikan landasan bagi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dapat bersinergi dengan koperasi desa dalam pengembangan ekonomi lokal.

Gambar 2.13
Unit Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Gambar 2.14
Alur Pendirian KD/LMP

Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran memberikan dukungan dan fasilitasi untuk memperkuat peran koperasi sebagai simpul distribusi pangan yang efisien dan stabil di tingkat desa, sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal yang berpihak pada petani dan konsumen

Tabel 2.11
Perumusan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Mengoptimalkan Ketersediaan Pangan di Jawa Tengah 2. Meningkatkan Keterjangkauan Pangan Masyarakat di Jawa Tengah 3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Pangan di Jawa Tengah	1. Belum Tersedianya Pangan Secara Mandiri di Jawa 2. Belum Optimalnya Keterjangkauan Pangan Masyarakat di Jawa Tengah 3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Pangan di Jawa Tengah	1. Alih fungsi lahan sawah 2. Perubahan iklim & fenomona cuaca ekstrem 3. Ketahanan air & infrastruktur irigasi 4. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) & hama penyakit 5. Penurunan produktivitas lahan & degradasi tanah 6. Keterjangkauan pangan & distribusi / logistik 7. Urbanisasi dan kepadatan penduduk 8. Akses Ekonomi dan Daya Beli 9. Keanekaragaman pangan dan diversifikasi komoditas 10. Keamanan dan Kualitas Pangan 11. Diversifikasi dan Pemanfaatan Pangan Lokal 12. Keanekaragaman pangan dan diversifikasi komoditas	1. Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan 2. Perubahan Iklim 3. Ketahanan Pangan 4. Konflik Sosial dan Ekonomi 5. Big Data	1. Kemiskinan 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Bencana	1. Kemiskinan 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Bencana	1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 2. Ketersediaan pangan 3. Cadangan Pangan 4. Distribusi dan Sistem Logistik Daerah 5. Kerawanan Pangan 6. Keamanan Pangan Segar 7. Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) 8. Stunting 9. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

A. Tujuan

Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan ketahanan pangan Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan Skor Indeks Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut IKP.

Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan angka PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktivitas yang dilakukan.

Dalam perhitungan Angka PoU yaitu dengan membuat komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin; Menghitung *Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER) dan *Coefficient Of Variation* (CV) dengan prosedur perhitungan MDER yaitu, 1). Menentukan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan data Susenas. 2) Menghitung kebutuhan energi minimum untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yang bersesuaian. 3) Menambahkan kebutuhan kalori untuk ibu hamil sebesar 210 Kkal, dikalikan dengan angka kelahiran.

Perhitungan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) memiliki manfaat untuk memantau tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dalam suatu populasi secara berkala, Indikator ini dapat menunjukkan kenaikan atau penurunan dalam ketersediaan makanan dan keterjangkauan pangan oleh rumah tangga, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan subnasional.

Jika diamati secara global, angka ketidakcukupan konsumsi pangan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Apabila hal ini terus terjadi tren meningkat setiap tahunnya maka ketidakcukupan konsumsi pangan akan berdampak sangat serius khususnya terhadap masalah kesehatan yang nantinya berhubungan erat dengan sumber daya manusia pada generasi penerus bangsa, terutama kaitannya dengan kasus *stunting*, *wasting* dan *underweight* pada anak.

IKP merupakan instrumen untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Dipilihnya indikator Skor IKP, karena dalam penyusunan Skor IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Dua Belas indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP yaitu Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang), Rasio Ketersediaan Energi per Kapita per

Hari terhadap standar kebutuhan, Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, Rasio cadangan pangan beras Pemerintah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundangan, Persentase Penduduk dengan Kesejahteraan rendah, Koefisien Varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng), *Prevalence of Undernourishment,* Rata-rata lama sekolah perempuan umur >15 tahun, Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, Persentase keamanan pangan yang memenuhi standar (segar dan siap saji) terhadap total sampel, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, dan Prevalensi Balita *Stunting*. Semakin tinggi Skor IKP, maka semakin membaik kondisi ketahanan pangan pada wilayah tersebut.

Tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (PD).

B. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan, yang ditunjukkan dengan indikator Prosentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan (%); Meningkatkan Pemanfaatan Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jawa Tengah; Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan dengan indikator Rata-Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras); dan Meningkatkan Ketersediaan Pangan dengan indikator Angka Ketersediaan Energi (AKE).

Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Manajemen Risiko.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Mewujudkan ketahanan pangan Jawa Tengah		Skor Indeks Ketahanan Pangan	Skor	84.8	85.34	85.47	85.6	85.85	86.1	86.34	86.57	86.57
			PoU	Angka	10.44	8.63	8.23	7.83	7.43	7.03	6.64	6.25	6.25
		Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	N/A	10.81	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5
			Rata-Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	%	N/A	6.86	8	8	8	8	8	8	8
		Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jawa Tengah	Skor	94,2	93,6	94,2	94,5	94,55	94,58	94,6	94,63	94.63

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Angka	4021	3805	3600	3625	3650	3675	3700	3725	3725
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	79	79	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	76	76
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	85	85	85.5	86	86.5	87	87.5	87.5
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	N/A	N/A	2.91	2.92	2.93	2.94	2.95	2.96	2.96

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menurut Undang - Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1). Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3). Penanganan kerawanan pangan, dan 4). Keamanan pangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya Ketahanan Pangan di Jawa Tengah	Mengoptimalkan Ketersediaan Pangan di Jawa Tengah	Mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan, memenuhi kebutuhan pangan dalam daerah pangan dari produksi Jawa Tengah, mengoptimalkan cadangan pangan di Jawa Tengah, mengurangi ketergantungan pada bahan pangan pokok tertentu	Mengoptimalkan Ketersediaan Pangan Yang Merata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
	Meningkatkan Keterjangkauan Pangan Masyarakat di Jawa Tengah	1. Menurunkan daerah dengan status rawan pangan dan gizi di Jawa Tengah 2. Menstabilkan fluktuasi harga pangan strategis	Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan
	Mengoptimalkan Pemanfaatan Pangan di Jawa Tengah	1. Meningkatkan prosentase pangan segar yang sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan 2. Mengoptimalkan pola konsumsi pangan masyarakat jawa tengah sesuai kaidah B2SA (beragam bergizi seimbang dan aman)	Mengoptimalkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
PENGUATAN PANGAN YANG CUKUP, MERATA, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN	PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN MUTU PANGAN MELALUI MODERNISASI INFRASTRUKTUR PANGAN BERKELANJUTAN	AKSELERASI TATA KELOLA KEBIJAKAN DALAM PENGARUSUTAMAAN KONSUMSI PANGAN YANG EFISIEN, BERMUTU DAN BERBASIS POTENSI LOKAL	PEMANTAPAN POLA KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN SERTA MENERAPKAN BUDAYA MAKAN YANG EFISIEN	PERWUJUDAN TATA KELOLA SISTEM PANGAN JAWA TENGAH YANG INKLUSIF, MERATA DAN BERKEADILAN

3.3 Manajemen Risiko Strategis Dinas Ketahanan Pangan

Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa yang mungkin timbul dan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Tingkat risiko residual harus berada pada level yang dapat diterima oleh manajemen (*risk appetite*). Organisasi akan menyusun dan memutakhirkan register risiko (*risk register*), yaitu sebuah daftar atas semua risiko signifikan yang mungkin berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang pada Tabel 3.2.

Kegiatan prioritas DISHANPAN pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Subsidi Harga Pangan untuk penanganan daerah rawan pangan pada daerah dengan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tinggi.
2. Subsidi Harga Pangan untuk Penanganan stunting di daerah dengan angka stunting tinggi.
3. Subsidi harga pangan untuk Produsen dan Konsumen guna untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di daerah yang mengalami inflasi.

Tabel 3.4 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Tujuan PD:								
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	-*Prevalence of Undernourishment* (PoU) -Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Ketersediaan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	12	- Potensi masing-masing wilayah berbeda, beberapa daerah tidak dapat menyediakan pangan yang cukup - Keterbatasan akses fisik (jarak) dan ekonomi (daya beli masyarakat rendah) - Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan B2SA	produktivitas rendah, kesehatan menurun, stunting, kemiskinan	- Pemberian bantuan pangan dan penyaluran komoditas pangan secara kontinyu dan tidak hanya pada komoditas pangan strategis - Pemberian subsidi harga pangan untuk masyarakat rawan pangan dan anak berisiko stunting, kegiatan berbagi pangan, koordinasi dengan Bappeda dan OPD untuk penanganan di luar aspek pangan - Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA yang lebih masif.	Kepala Dinas	2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
						Penganekaragaman dalam mengkonsumsi pangan berbahan baku potensi pangan spesifik lokasi, Fasilitasi pelaku usaha pangan lokal. Pengembangan pangan lokal. Gerakan cinta pangan lokal.		
		Pangan yang tersedia tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	12	-Minimnya edukasi masyarakat tentang pangan aman dan bergizi -Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi komitmen jaminan mutu dan keamanan pangan yang telah diterbitkan	Masyarakat mengonsumsi pangan yang tidak sesuai jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga muncul potensi keracunan pangan, penyakit kronis, dan memperburuk gizi buruk.	-Edukasi keamanan pangan di wilayah POU Tinggi -Pelaporan dan tindak lanjut hasil surveilan	Kepala Dinas	2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Sasaran Strategis PD:								
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	12	Jawa Tengah bukan merupakan sentra produksi untuk komoditas tertentu, seperti : bawang putih, kedelai, gula dan minyak goreng.	komoditas tertentu masih didatangkan dari luar karena ketersediaan dalam daerah belum mencukupi	- Koordinasi dengan Dinas Teknis Produksi untuk optimalisasi produksi komoditas pangan yang masih kurang - Pemenuhan kebutuhan pangan yang tidak dapat diproduksi sendiri, dengan impor mendatangkan dari daerah lain baik domestik maupun luar negeri	Kepala Dinas	2025-2029
Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	16	Panjangnya rantai distribusi pangan	terjadinya inflasi	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2025-2029
	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	9	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke	Koordinasi dengan Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yang	Kepala Dinas	2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
					level prioritas rendah	membutuhkan bantuan di luar aspek pangan		
Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah	Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih dibawah/di atas angka konsumsi ideal	16	Pola konsumsi masyarakat belum B2SA, pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal masih rendah.	Malnutrisi atau stunting, penyakit tidak menular, status gizi masyarakat.	Koordinasi dengan dinas teknis untuk meningkatkan produksi pangan lokal, Rakor analisis skor PPH dengan kabupaten/kota, Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA, Pengenalan pangan lokal substitusi beras dan gandum, promosi pangan lokal melalui media dan pameran, fasilitasi alat bagi pelaku usaha pangan lokal. Pemanfaatan pangan lokal yang lebih masif.	Kepala Dinas	2025-2029

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PANGAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pangan).

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

A. Rencana Program

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, program dimaksud adalah:

1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
2) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
3) Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan
4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

B. Kegiatan

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output). Kegiatan tersebut meliputi :

1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri dari:
   a. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi;
   b. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; dan
   c. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi.
2) Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri dari:
   a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.
3) Program Pengawasan Keamanan Pangan, terdiri dari :
   a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri

dari :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
f. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

C. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sub Kegiatan tersebut meliputi :

1) Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
   a. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
2) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
   a. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
   b. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi;
   c. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi;
   d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya;
   e. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
   f. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
3) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
   a. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
4) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi;
   b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran

Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

c. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
d. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi

5) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   a. Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan Segar Asal Tumbuhan;
   b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
   c. Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
   d. Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
   e. Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
6) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   c. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;
   d. Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah.
7) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
8) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; dan
   b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
9) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
10) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
11) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan

g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

12) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
14) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

D. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam rangka mengimplementasikan program prioritas urusan pangan antara lain aparat provinsi dan kabupaten/kota serta kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), masyarakat miskin di daerah rawan pangan, balita berisiko stunting di daerah desa stunting, kelompok UMKM, kelompok wanita tani, PKK, dan sebagainya.

Penetapan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja dan pendanaan indikatif DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 untuk kegiatan publik sebagaimana tertuang pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah *											47,438,420,000		39,817,670,000		39,917,670,000		40,717,670,000		56,307,420,000	Dinas Ketahanan Pangan	
							Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) *	%	8.63	7.83		7.43		7.03		6.64		6.25		Dinas Ketahanan Pangan	
							Indeks Ketahanan Pangan *	Angka	85.34	85.6		85.85		86.1		86.34		86.57		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan **										6,200,000,000		8,200,000,000		8,200,000,000		8,200,000,000		12,200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
							Angka Ketersediaan Energi (AKE) **	kkal/kapita/hari	3805	3625	6,200,000,000	3650	8,200,000,000	3675	8,200,000,000	3700	8,200,000,000	3725	12,200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT ***								6,200,000,000		8,200,000,000		8,200,000,000		8,200,000,000		12,200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Tercapaianya rata-rata angka ketersediaan pangan	Rata-rata Ketersediaan Pangan ***	Angka	2	1.21	200,000,000	1.22	200,000,000	1.23	200,000,000	1.24	200,000,000	1.25	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ****							200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan ****	Dokumen	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	
		2.09.03.1.01.0013			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) *****						200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) *****	Dokumen	12	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
						Terjaganya cadangan pangan pemerintah daerah sesuai regulasi	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) ***	Angka	0.65	0.47	6,000,000,000	0.48	8,000,000,000	0.49	8,000,000,000	0.5	8,000,000,000	0.51	12,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
		2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi ****							6,000,000,000		8,000,000,000		8,000,000,000		8,000,000,000		12,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Tersalurkannya cppd dalam rangka penanganan kerawanan pangan, kemiskinan, bencana dan stabilisasi harga	persentase penyaluran cppd ****	%	N/A	50	6,000,000,000	50	8,000,000,000	50	8,000,000,000	50	8,000,000,000	50	12,000,000,000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	
		2.09.03.1.02.0005			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi *****						6,000,000,000		8,000,000,000		8,000,000,000		8,000,000,000		12,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara *****	Ton	581.18	450	6,000,000,000	500	8,000,000,000	500	8,000,000,000	500	8,000,000,000	500	12,000,000,000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
	Meningkatnya Keterjangkauan Pangan **										21,840,000,000		23,090,000,000		23,140,000,000		23,940,000,000		31,688,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras) **	%	6.86	8	14,190,000,000	8	15,440,000,000	8	15,490,000,000	8	16,290,000,000	8	21,050,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT ***								14,190,000,000		15,440,000,000		15,490,000,000		16,290,000,000		21,050,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Terwujudnya Harga Efektif komoditas pangan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku ***	%	84	62.5	14,190,000,000	65	15,440,000,000	67.5	15,490,000,000	70	16,290,000,000	72.5	21,050,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ****							14,190,000,000		15,440,000,000		15,490,000,000		16,290,000,000		21,050,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Jumlah Intervensi Stabilisasi Harga	Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP ****	%	100	100	10,390,000,000	100	9,390,000,000	100	9,390,000,000	100	10,190,000,000	100	12,500,000,000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
		2.09.03.1.01.0009			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi *****						10,390,000,000		9,390,000,000		9,390,000,000		10,190,000,000		12,500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins *****	Laporan	N/A	2	10,390,000,000	2	9,390,000,000	2	9,390,000,000	2	10,190,000,000	2	12,500,000,000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI PASOKAN	VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN ****	Ton	1010.4	725	2,000,000,000	750	3,500,000,000	775	3,500,000,000	800	3,500,000,000	825	4,250,000,000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
		2.09.03.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya *****						2,000,000,000		3,500,000,000		3,500,000,000		3,500,000,000		4,250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya *****	Laporan	N/A	3	2,000,000,000	3	3,500,000,000	3	3,500,000,000	3	3,500,000,000	3	4,250,000,000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Pangan	Persentase peningkatan kelembagaan usaha pangan ****	Angka	N/A	10	1,800,000,000	10	2,550,000,000	10	2,600,000,000	10	2,600,000,000	10	4,300,000,000	Pokja Pascapanen dan Kelembagaan Usaha Pangan	
		2.09.03.1.01.0011			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi *****						1,800,000,000		2,550,000,000		2,600,000,000		2,600,000,000		4,300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan *****	Unit	N/A	50	1,800,000,000	50	2,550,000,000	50	2,600,000,000	50	2,600,000,000	50	4,300,000,000	Pokja Pascapanen dan Kelembagaan Usaha Pangan	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
							Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan **	%	10.81	8	7,650,000,000	6	7,650,000,000	6.25	7,650,000,000	6.5	7,650,000,000	6.75	10,638,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN ***								7,650,000,000		7,650,000,000		7,650,000,000		7,650,000,000		10,638,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Menurunnya daerah rawan pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan ***	%	N/A	14.6	7,650,000,000	13.6	7,650,000,000	12.6	7,650,000,000	11.6	7,650,000,000	11	10,638,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
		2.09.04.1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi ****							7,650,000,000		7,650,000,000		7,650,000,000		7,650,000,000		10,638,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
						Tertanganinya Desa Rawan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah	PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI ****	%	12.12	6	4,436,000,000	6.5	4,436,000,000	7	4,436,000,000	7.5	4,436,000,000	8	5,514,000,000	Pokja Kerawanan Pangan	
		2.09.04.1.02.0002			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
						Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****	Dokumen	N/A	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Pokja Kerawanan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
		2.09.04.1.02.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi *****						4,336,000,000		4,336,000,000		4,336,000,000		4,336,000,000		5,414,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi *****	Laporan	N/A	2	4,336,000,000	2	4,336,000,000	2	4,336,000,000	2	4,336,000,000	2	5,414,000,000	Pokja Kerawanan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
						Peningkatan Penyelamatan Pangan di Jawa Tengah	Persentase Peningkatan Pangan yang Diselamatkan ****	%	N/A	3	450,000,000	3.1	450,000,000	3.2	450,000,000	3.3	450,000,000	3.4	650,000,000	Pokja Penyelamatan Pangan	
		2.09.04.1.02.0003			Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi *****						450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		650,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
						Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi *****	Dokumen	N/A	1	450,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	1	650,000,000	Pokja Penyelamatan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
						Terwujudnya deteksi dini, pencegahan, dan penanganan masalah pangan dan gizi	Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi ****	Dokumen	N/A	12	2,764,000,000	12	2,764,000,000	12	2,764,000,000	12	2,764,000,000	12	4,474,000,000	Pokja Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
		2.09.04.1.02.0005			Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi *****						2,764,000,000		2,764,000,000		2,764,000,000		2,764,000,000		4,474,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
						Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi *****	Dokumen	N/A	2	2,764,000,000	2	2,764,000,000	2	2,764,000,000	2	2,764,000,000	2	4,474,000,000	Pokja Kewaspadaan Pangan dan Gizi	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan **										19,398,420,000		8,527,670,000		8,577,670,000		8,577,670,000		12,419,420,000	Dinas Ketahanan Pangan	
							Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah **	Angka	93.6	94.5	19,398,420,000	94.55	8,527,670,000	94.58	8,577,670,000	94.6	8,577,670,000	94.63	12,419,420,000	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT ***								4,492,500,000		4,492,500,000		4,542,500,000		4,542,500,000		5,767,500,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	
						Menurunnya Angka Konsumsi Beras di Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah ***	kg/kapita/tahun	87.8	87.3	4,492,500,000	87	4,492,500,000	86.6	4,542,500,000	86.3	4,542,500,000	86	5,767,500,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ****							3,542,500,000		3,542,500,000		3,542,500,000		3,542,500,000		4,717,500,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	
						Terfasilitaasinya Kelompok / Pelaku Usaha Pengembangan Pangan Olahan Lokal dan Pangan Pokok Lokal	JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL YANG DIFASILITASI ****	Kelompok	25	10	2,955,000,000	10	2,955,000,000	10	2,955,000,000	10	2,955,000,000	10	4,130,000,000	Pokja Pengembangan Pangan Lokal	
		2.09.03.1.01.0007			Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal *****						2,955,000,000		2,955,000,000		2,955,000,000		2,955,000,000		4,130,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	
						Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal *****	Laporan	N/A	1	2,955,000,000	1	2,955,000,000	1	2,955,000,000	1	2,955,000,000	1	4,130,000,000	Pokja Pengembangan Pangan Lokal	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Penguatan Pangan B2SA Pada Kabupaten dan / Kota Di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten Yang Terfasilitasi Penguatan Pangan B2SA ****	%	N/A	42	587,500,000	42	587,500,000	42	587,500,000	42	587,500,000	42	587,500,000	Pokja Pola Konsumsi Pangan B2SA	
		2.09.03.1.01.0006			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga *****						587,500,000		587,500,000		587,500,000		587,500,000		587,500,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	
						Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga *****	Dokumen	N/A	1	587,500,000	1	587,500,000	1	587,500,000	1	587,500,000	1	587,500,000	Pokja Pola Konsumsi Pangan B2SA	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
		2.09.03.1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi ****							950,000,000		950,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,050,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	
						PELAKSANAAN EDUKASI DAN PROMOSI B2SA	Jumlah Pelaksanaan Promosi B2SA dan Pangan Lokal ****	Kali	N/A	7	950,000,000	7	950,000,000	7	1,000,000,000	7	1,000,000,000	7	1,050,000,000	Pokja Promosi Penganekaragaman Pangan Lokal	
		2.09.03.1.04.0001			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal *****						950,000,000		950,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,050,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	
						Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal *****	Dokumen	N/A	5	950,000,000	5	950,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,050,000,000	Pokja Promosi Penganekaragaman Pangan Lokal	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN ***								3,155,920,000		2,635,170,000		2,635,170,000		2,635,170,000		5,251,920,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan ***	%	N/A	90.1	3,155,920,000	90.2	2,635,170,000	90.3	2,635,170,000	90.4	2,635,170,000	90.5	5,251,920,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							3,155,920,000		2,635,170,000		2,635,170,000		2,635,170,000		5,251,920,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan	
						Terselenggaranya Pengawasan produk pangan segar yang teregistrasi di peredaran	Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran ****	%	88.1	84	2,529,620,000	84	2,208,870,000	84	2,208,870,000	84	2,208,870,000	84	4,575,620,000	Pokja Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0008			Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						2,529,620,000		2,208,870,000		2,208,870,000		2,208,870,000		4,575,620,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan	
						Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan *****	Dokumen	N/A	1	2,529,620,000	1	2,208,870,000	1	2,208,870,000	1	2,208,870,000	1	4,575,620,000	Pokja Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
						Tersusunya Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN ****	Dokumen	1	1	146,300,000	1	146,300,000	1	146,300,000	1	146,300,000	1	152,300,000	Pokja Penanganan Ketidaksesuaian Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan *****						146,300,000		146,300,000		146,300,000		146,300,000		152,300,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan *****	Dokumen	N/A	1	146,300,000	1	146,300,000	1	146,300,000	1	146,300,000	1	152,300,000	Pokja Penanganan Ketidakseuaian Mutu dan Keamanan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
						Terlaksananya pembinaan penjaminan mutu dan keamanan pangan pada Kelompok / Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pelaku usaha / Kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan kemanan pangan ****	Kelompok	N/A	50	480,000,000	50	280,000,000	50	280,000,000	50	280,000,000	50	524,000,000	Pokja Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0009			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan *****						480,000,000		280,000,000		280,000,000		280,000,000		524,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan	
						terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan *****	Dokumen	N/A	1	480,000,000	1	280,000,000	1	280,000,000	1	280,000,000	1	524,000,000	Pokja Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN ***								11,750,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Terjaminnya pangan segar asal tumbuhan melalui sertifikasi dan registrasi	Persentase Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar ***	%	N/A	40	11,750,000,000	40	1,400,000,000	40	1,400,000,000	40	1,400,000,000	40	1,400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
		2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							11,750,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terbitnya rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan ****	%	91	80	400,000,000	80	500,000,000	80	500,000,000	80	500,000,000	80	500,000,000	Pokja Sertifikasi dan Registrasi Pangan	
		2.09.05.1.01.0007			Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan *****						400,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan *****	Dokumen	119	50	400,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	Pokja Sertifikasi dan Registrasi Pangan	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH
						Terbitnya LHU (Laporan Hasil Uji)	Jumlah LHU (Laporan Hasil Uji) yang diterbitkan ****	Dokumen	N/A	100	11,350,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	Pokja Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0010			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan *****						11,350,000,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan *****	Dokumen	1	1	11,350,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	Pokja Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Ketahanan Pangan *											26,732,793,000		21,800,722,000		21,785,842,000		21,775,167,000		22,434,701,000	Dinas Ketahanan Pangan	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan *	Angka	79	75.6		75.7		75.8		75.9		76		Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan **										25,732,793,000		20,800,722,000		20,785,842,000		20,775,167,000		21,434,701,000	Dinas Ketahanan Pangan	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan **	Angka	85	85.5	25,732,793,000	86	20,800,722,000	86.5	20,785,842,000	87	20,775,167,000	87.5	21,434,701,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								23,916,793,000		19,714,722,000		19,699,842,000		19,689,167,000		20,028,701,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan ***	%	86	87	23,916,793,000	87.5	19,714,722,000	88	19,699,842,000	88.5	19,689,167,000	89	20,028,701,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							15,850,000,000		15,850,000,000		15,850,000,000		15,850,000,000		15,850,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	N/A	15,850,000,000	N/A	15,850,000,000	N/A	15,850,000,000	N/A	15,850,000,000	N/A	15,850,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****						15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	98	111	15,000,000,000	111	15,000,000,000	111	15,000,000,000	111	15,000,000,000	111	15,000,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	400,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****						450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	12	12	450,000,000	12	450,000,000	12	450,000,000	12	450,000,000	12	450,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****							120,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	120,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						100,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	2	2	100,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						20,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	4	4	20,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ****							10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Meningkatnya pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ****	Laporan	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04 .0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	12	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.05 .0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****						150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							1,195,000,000		1,195,000,000		1,195,000,000		1,195,000,000		1,210,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	1,195,000,000	100	1,195,000,000	100	1,195,000,000	100	1,195,000,000	100	1,210,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						90,000,000		90,000,000		90,000,000		90,000,000		100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	90,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	12	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						90,000,000		90,000,000		90,000,000		90,000,000		90,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	90,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	12	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						700,000,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	700,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****						120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	12	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							124,793,000		132,722,000		117,842,000		107,167,000		251,701,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	70	10	124,793,000	10	132,722,000	10	117,842,000	10	107,167,000	10	251,701,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						124,793,000		132,722,000		117,842,000		107,167,000		251,701,000	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	70	10	124,793,000	10	132,722,000	10	117,842,000	10	107,167,000	10	251,701,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							1,457,000,000		1,507,000,000		1,507,000,000		1,507,000,000		1,557,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	24	24	1,457,000,000	24	1,507,000,000	24	1,507,000,000	24	1,507,000,000	24	1,557,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						450,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		550,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	450,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	12	550,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						1,007,000,000		1,007,000,000		1,007,000,000		1,007,000,000		1,007,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	1,007,000,000	12	1,007,000,000	12	1,007,000,000	12	1,007,000,000	12	1,007,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							5,010,000,000		720,000,000		720,000,000		720,000,000		850,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	85	86	5,010,000,000	82	720,000,000	77	720,000,000	72	720,000,000	67	850,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						420,000,000		420,000,000		420,000,000		420,000,000		450,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	23	26	420,000,000	26	420,000,000	26	420,000,000	26	420,000,000	26	450,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						4,500,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	2	2	4,500,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	300,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						90,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	60	60	90,000,000	55	100,000,000	50	100,000,000	45	100,000,000	40	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								1,816,000,000		1,086,000,000		1,086,000,000		1,086,000,000		1,406,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan ***	%	86	87	1,816,000,000	87.5	1,086,000,000	88	1,086,000,000	88.5	1,086,000,000	89	1,406,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****							40,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	40,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						40,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	40,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						24,000,000		24,000,000		24,000,000		24,000,000		24,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						24,000,000		24,000,000		24,000,000		24,000,000		24,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						24,000,000		24,000,000		24,000,000		24,000,000		24,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	12	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						48,000,000		48,000,000		48,000,000		48,000,000		48,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							0		100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	20	0	0	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	300,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	20	10	0	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	300,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							536,000,000		586,000,000		586,000,000		586,000,000		586,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	24	24	536,000,000	24	586,000,000	24	586,000,000	24	586,000,000	24	586,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						250,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	250,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						286,000,000		286,000,000		286,000,000		286,000,000		286,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	286,000,000	12	286,000,000	12	286,000,000	12	286,000,000	12	286,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							1,090,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		320,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	11	11	1,090,000,000	11	200,000,000	11	200,000,000	11	200,000,000	11	320,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						1,000,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1,000,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						90,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	10	10	90,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	120,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan **										1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan **	Angka	N/A	2.92	1,000,000,000	2.93	1,000,000,000	2.94	1,000,000,000	2.95	1,000,000,000	2.96	1,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan ***	%	80	90	1,000,000,000	90	1,000,000,000	95	1,000,000,000	95	1,000,000,000	95	1,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****							1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****						500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	5	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****						450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	5	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****						25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****						25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 4.2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	Subsidi Pangan Murah	Fasilitasi Distribusi	BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI PASOKAN Target: 2025: 3 Laporan 2026: 3 Laporan 2027: 3 Laporan 2028: 3 Laporan 2029: 3 Laporan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	1. Disperindag Provinsi Jawa Tengah 2. Dinas Yang Menangani Urusan Pangan di Kabupaten dan Kota
		Subsidi Pangan Murah untuk Produsen dan Konsumen	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi Target: 2025: 2 Laporan 2026: 2 Laporan 2027: 2 Laporan 2028: 2 Laporan 2029: 2 Laporan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	1. Disperindag Provinsi Jawa Tengah 2. Dinas Yang Menangani Urusan Pangan di Kabupaten dan Kota 3. JTAB (BUMD)

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
2	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Disabilitas, Perempuan, Pelaku Ekonomi Kreatif, dan Sport Center)	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal pada Kecamatan Berdaya	Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal Target: 2025: 1 Laporan 2026: 1 Laporan 2027: 1 Laporan 2028: 1 Laporan 2029: 1 Laporan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	1. Dinas Yang Menangani Urusan Pangan di Kabupaten dan Kota

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan

Tabel. 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Keterangan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Ketahanan Pangan	84,8	85,34	85,47	85,6	85,85	86,1	86,34	86,57	
2	*Prevalence Of Undernourishment*	10,44	8,63	8,23	7,83	7,43	7,03	6,64	6,25	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	79	75,5	75,6	75,7	75,8	75,9	76	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Keterangan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	45,9%	65,43%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
2	Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	94,2	93,6	94,2	94,5	94,55	94,58	94,6	94,63	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	N/A	N/A	15,6	14,6	13,6	12,6	11,6	11	
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	N/A	N/A	90	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung Tujuan "Mewujudkan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan".

Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan. Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Pada perjalanannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat di reviu, jika target kinerja sudah terlampaui atau terdapat perubahan target.

Periodesasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Diharapkan anggaran yang dialokasikan selama lima tahun mendatang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung pemenuhan target indikator kinerja utama, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan akhir periode.

Renstra Tahun 2025-2029 ini agar dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. Dyah Lukisari, M.Si.
NIP. 19661016 199203 2 006

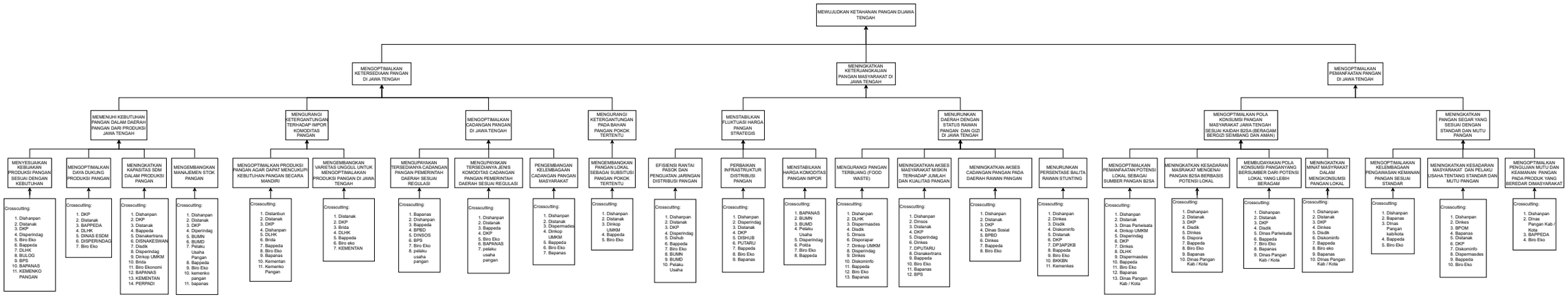
MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DIJAWA TENGAH
MENGOPTIMALKAN KETERSEDIAAN PANGAN DI JAWA TENGAH
MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN DALAM DAERAH PANGAN DARI PRODUKSI JAWA TENGAH
MENYESUAIKAN KEBIJAKAN PRODUKSI PANGAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Distanak
3. DKP
4. Disperindag
5. Biro Eko
6. Bappeda
7. DLHK
8. BULOG
9. BPS
10. BAPANAS
11. KEMENKO PANGAN
MENGOPTIMALKAN DAYA DUKUNG PRODUKSI PANGAN
Crosscutting:
1. DKP
2. Distanak
3. BAPPEDA
4. DLHK
5. DINAS ESDM
6. DISPERINDAG
7. Biro Eko
MENINGKATKAN KAPASITAS SDM DALAM PRODUKSI PANGAN
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. DKP
3. Distanak
4. Bappeda
5. Disnakertrans
6. DISNAKESWAN
7. Disdik
8. Disperindag
9. Dinkop UMKM
10. Brida
11. Biro Ekonomi
12. BAPANAS
13. KEMENTAN
14. PERPADI
MENGEMBANGKAN MANAJEMEN STOK PANGAN
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Distanak
3. DKP
4. Disperindag
5. BULMN
6. BUMD
7. Pelaku Usaha Pangan
8. Bappeda
9. Biro Eko
10. kemenko pangan
11. bapanas
MENGURANGI KETERGANTUNGAN TERHADAP IMPOR KOMODITAS PANGAN
MENGOPTIMALKAN PRODUKSI PANGAN AGAR DAPAT MENCUKUPI KEBUTUHAN PANGAN SECARA MANDIRI
Crosscutting:
1. Distanbun
2. Distanak
3. DKP
4. Dishanpan
5. DLHK
6. Brida
7. Bappeda
8. Biro Eko
9. Bapanas
10. Kementan
11. Kemenko Pangan
MENGEMBANGKAN VARIETAS UNGGUL UNTUK MENGOPTIMALAKAN PRODUKSI PANGAN DI JAWA TENGAH
Crosscutting:
1. Distanak
2. DKP
3. Brida
4. DLHK
5. Bappeda
6. Biro eko
7. KEMENTAN
MENGOPTIMALKAN CADANGAN PANGAN DI JAWA TENGAH
MENGUPAYAKAN TERSEDIANYA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI REGULASI
Crosscutting:
1. Bapanas
2. Dishanpan
3. Bappeda
4. BPBD
5. DINSOS
6. BPS
7. Biro Eko
8. pelaku usaha pangan
MENGUPAYAKAN TERSEDIANYA JENIS KOMODITAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI REGULASI
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Distanak
3. Bappeda
4. DKP
5. Biro Eko
6. BAPANAS
7. pelaku usaha pangan
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Distanak
3. Dispermades
4. Dinkop UMKM
5. Bappeda
6. Biro Eko
7. Bapanas
MENGURANGI KETERGANTUNGAN PADA BAHAN PANGAN POKOK TERTENTU
MENGEMBANGKAN PANGAN LOKAL SEBAGAI SUBSITUSI PANGAN POKOK TERTENTU
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Distanak
3. Dinkop UMKM
4. Bappeda
5. Biro Eko
MENINGKATKAN KETERJANGKAUAN PANGAN MASYARAKAT DI JAWA TENGAH
MENSTABILKAN FLUKTUASI HARGA PANGAN STRATEGIS
EFISIENSI RANTAI PASOK DAN PENGUATAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Distanak
3. DKP
4. Disperindag
5. Dishub
6. Bappeda
7. Biro Eko
8. BUMN
9. BUMD
10. Pelaku Usaha
PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI PANGAN
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Disperindag
3. Distanak
4. DKP
5. DISHUB
6. PUTARU
7. Bappeda
8. Biro Eko
9. Bapanas
MENSTABILKAN HARGA KOMODITAS PANGAN IMPOR
Crosscutting:
1. BAPANAS
2. BUMN
3. BUMD
4. Pelaku Usaha
5. Disperindag
6. Polda
7. Biro Eko
8. Bappeda
MENURUNKAN DAERAH DENGAN STATUS RAWAN PANGAN DAN GIZI DI JAWA TENGAH
MENGURANGI PANGAN TERBUANG (FOOD WASTE)
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. DLHK
3. Dispermasdes
4. Disdik
5. Dinsos
6. Disporapar
7. Dinkop UMKM
8. Disperindag
9. Dinkes
10. Diskominfo
11. Bappeda
12. Biro Eko
13. Bapanas
MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT MISKIN TERHADAP JUMLAH DAN KUALITAS PANGAN
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Dinsos
3. Distanak
4. DKP
5. Disperindag
6. Dinkes
7. DPUTARU
8. Disnakertrans
9. Bappeda
10. Biro Eko
11. Bapanas
12. BPS
MENINGKATKAN AKSES CADANGAN PANGAN PADA DAERAH RAWAN PANGAN
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Distanak
3. DKP
4. Dinas Sosial
5. BPBD
6. Dinkes
7. Bappeda
8. Biro Eko
MENURUNKAN PERSENTASE BALITA RAWAN STUNTING
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Dinkes
3. Disdik
4. Diskominfo
5. Distanak
6. DKP
7. DPJAP2KB
8. Bappeda
9. Biro Eko
10. BKKBN
11. Kemenkes
MENINGKATKAN PEMANFAATAN PANGAN DI JAWA TENGAH
MENGOPTIMALKAN POLA KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT JAWA TENGAH SESUAI KAIDAH B2SA (BERAGAM BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN)
MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN POTENSI LOKAL SEBAGAI SUMBER PANGAN B2SA
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Distanak
3. Dinas Pariwisata
4. Dinkop UMKM
5. Disperindag
6. DKP
7. Dinkes
8. DLHK
9. Dispermasdes
10. Bappeda
11. Biro Eko
12. Bapanas
13. Dinas Pangan Kab / Kota
MENINGKATKAN KESADARAN MASRAKAT MENGENAI PANGAN B2SA BERBASIS POTENSI LOKAL
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Distanak
3. DKP
4. Disdik
5. Dinkes
6. Dispora
7. Bappeda
8. Biro Eko
9. Bapanas
10. Dinas Pangan Kab / Kota
MEMBUDAYAKAN POLA KONSUMSI PANGANYANG BERSUMBER DARI POTENSI LOKAL YANG LEBIH BERAGAM
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Distanak
3. DKP
4. Disdik
5. Dinas Pariwisata
6. Bappeda
7. Biro Eko
8. Bapanas
9. Dinas Pangan Kab / Kota
MENINGKATKAN MINAT MASYRAKAT DALAM MENGKONSUMSI PANGAN LOKAL
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Distanak
3. DKP
4. Dinkes
5. Disdik
6. Diskominfo
7. Bappeda
8. Biro eko
9. Bapanas
10. Dinas Pangan Kab / Kota
MENINGKATKAN PANGAN SEGAR YANG SESUAI DENGAN STANDAR DAN MUTU PANGAN
MENGOPTIMALKAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN KEMANAN PANGAN SESUAI STANDAR
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Bapanas
3. Dinas Pangan kab/kota
4. Bappeda
5. Biro Eko
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA TENTANG STANDAR DAN MUTU PANGAN
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Dinkes
3. BPOM
4. Bapanas
5. Distanak
6. DKP
7. Diskominfo
8. Dispermasdes
9. Bappeda
10. Biro Eko
MENGOPTIMALKAN PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PADA PRODUK YANG BEREDAR DIMASYARAKAT
Crosscutting:
1. Dishanpan
2. Dinas Pangan Kab / Kota
3. BAPPEDA
4. Biro Eko

Tujuan	Tujuan : MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN	
	Indikator Tujuan 1 : PoU (*Prevalence of Undernourishment*) Target (2025-2030) : 8,23. 7,83. 7,43. 7,03. 6,64. 6,25 Satuan: % Jenis Progres Indikator: Progres Negatif Formulasi: Skor PoU (Prevalence of Undernourishment) Sesuai Dengan Susenas BPS	Indikator Tujuan 2 : IKP (INDEKS KETAHANAN PANGAN) Target (2025-2030) : 85.47, 85.60, 85.85, 86.10, 86.34, 86.57 Satuan: Angka Jenis Progres Indikator: Progres Positif Formulasi: Skor IKP (Indeks Ketahanan Pangan) sesuai dengan angka yang rilis dari Bapanas

Sasaran	SASARAN 1 : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN Indikator Sasaran: Angka Ketersediaan Energi Target (2025-2030) : 3600,3625,3650,3675,3700, 3725 Satuan: Kkal/Kapita/Hari Jenis Proses Indikator: Progres Positif Formulasi: Ketersediaan per kapita x BDD x kandungan energi dr 100 gram bahan makanan /100	
Program	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
	Sasaran Strategis: TERCAPAINYA RATA-RATA ANGKA KETERSEDIAAN PANGAN Indikator Program: RATA-RATA KETERSEDIAAN PANGAN Target (2025-2030) : 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 Satuan: ANGKA Jenis Proses Indikator: PROGRES POSITIF Formulasi: *rata-rata rasio (ketersediaan/kebutuhan) 12 komoditas pangan strategis*	Sasaran Strategis: MENGUPAYAKAN TERSEDIANYA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI REGULASI Indikator Program: Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 Target (2025-2030) : 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.50, 0.51 Satuan: Angka Jenis Proses Indikator: Progres Positif Formulasi: Pengelolaan CPPD min 45% dari Regulasi
Kegiatan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kegiatan KEGIATAN PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN PROVINSI
	Sasaran Strategis: Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan Target (2025-2030) : 1,1,1,1,1,1 Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: Pengulangan Formulasi: Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	Sasaran Strategis: *tersalurkannya cppd dalam rangka penanganan kerawanan pangan, kemiskinan, bencana dan stabilisasi harga* Indikator Kegiatan: persentase penyaluran cppd Target (2025-2030) : 50 Satuan: % Jenis Proses Indikator: Progres positif Formulasi: *(volume cppd yang disalurkan / volume cppd yang dikelola) x 100*
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
	Sasaran Strategis: Tersedianya Dokuemen NBM Indikator Sub Kegiatan: Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Target: 2 (SELAMA 5 TAHUN) Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Penyusunan Dokumen NBM DAN NPW	Sasaran Strategis: Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintahan Provinsi yang Terpelihara Target: 450, 450, 500, 500, 500, 500 Satuan: Ton Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
AKTIFITAS	TIM POKJA KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN 1. PENYUSUNAN NPW	TIM POKJA KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN 1. PENYEDIAAN & PENGELOLAAN CPPD (CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH)

Sasaran	SASARAN 2 : MENINGKATNYA KETERJANGKAUAN						
	Indikator Sasaran: RATA-RATA DEVIASI HARGA PANGAN STRATEGIS (BERAS) Target (2025-2030) : 8 Satuan: % Jenis Proses Indikator: Progres Positif Formulasi: (RATA-RATA HARGA HARIAN SELAMA SATU TAHUN-HET) / HET X 100			Indikator Sasaran: PERSENTASE PENANGANAN KECAMATAN RAWAN PANGAN Target (2025-2030) : 15.6, 14.6, 13.6, 12.6, 11.8, 11 Satuan: % Jenis Proses Indikator: Progres Positif Formulasi: (KECAMATAN {P1,P2,P3} RAWAN PANGAN & GIZI YANG TERTANGANI / JUMLAH KECAMATAN {P1,P2,P3} RAWAN PANGAN & GIZI T-1) X 100			
Program	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan			Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi			
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
	Sasaran Strategis: Mewujudkan Harga Efektif Sesuai Ketentuan yang Berlaku Indikator Program : Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku Target (2025-2030) : 60, 62.50, 65, 67.50, 70, 72.50 Satuan: % Jenis Proses Indikator: PROGRES POSITIF Formulasi: (JUMLAH KOMODITAS PANGAN DENGAN HARGA EFEKTIF / 14 KOMODITAS PANGAN STRATEGIS) x 100 persen (BERAS MEDIUM, BERAS PREMIUM, CABE RAWIT MERAH, CABE MERAH KERITING, KEDELAI, JAGUNG, TELUR UNGGAS, DAGING UNGGAS, DAGING SAPI, DAGING KERBAU, MINYAK GORENG, BAWANG MERAH, BAWANG PUTIH, GULA)			Sasaran Strategis: MENURUNNYA DAERAH RAWAN PANGAN Indikator Program : PERSENTASE DAERAH RAWAN PANGAN Target (2025-2030) : 15.6, 14.6, 13.6, 12.6 11.6, 11 Satuan: % Jenis Proses Indikator: Progres Negatif Formulasi: (Jumlah Kecamatan Rawan Pangan P1,P2,P3 / Jumlah Kecamatan di Jawa Tengah) x 100%			
Kegiatan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			Kegiatan PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN PROVINSI			
	Sasaran Strategis: Jumlah Intervensi Stabilisasi Harga Indikator Kegiatan: Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP Target (2025-2030) : 100 Satuan: % Jenis Proses Indikator: Progres Positif Formulasi: (Jumlah Intervensi Stabilisasi Harga Sesuai SOP / Jumlah Intervensi) x 100	Sasaran Strategis: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Pangan Indikator Kegiatan: Persentase peningkatan kelembagaan usaha pangan Target (2025-2030) : 10 Satuan: % Jenis Proses Indikator: Pengulangan Formulasi: (Jumlah lembaga usaha pangan yang difasilitasi kelembagaan T - Jumlah lembaga usaha pangan yang difasilitasi kelembagaan T-1) x 100	Sasaran Strategis: BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI PASOKAN Indikator Kegiatan: VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN Target: 700, 725, 750, 775, 800, 825 Satuan: Ton Jenis Proses Indikator: Progres Positif Formulasi: JUMLAH BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENYALURANNYA	Sasaran Strategis: Tertanganinya Desa Rawan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah Indikator Kegiatan: PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI Target (2025-2030) : 5.50, 6, 6.50, 7, 7.50, 8 Satuan: % Jenis Proses Indikator: Formulasi: JUMLAH DESA {P1,P2,P3} RAWAN PANGAN & GIZI YANG TERTANGANI / JUMLAH DESA OVERLAY {P1,P2,P3} RAWAN PANGAN & GIZI T-1) X 100		Sasaran Strategis: Peningkatan Penyelematan Pangan di Jawa Tengah Indikator Kegiatan: Persentase Peningkatan Pangan yang Diselamatkan Target (2025-2030) : N/A, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Satuan:% Jenis Proses Indikator: positif Formulasi: {(Jumlah Pangan yang diselamatkan T- Jumlah Pangan yang diselamatkanT-1)/Jumlah Pangan yang diselamatkan T-1 x 100}	Sasaran Strategis: Terwujudnya deteksi dini, pencegahan, dan penanganan masalah pangan dan gizi Indikator Kegiatan: Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Target (2025-2030) : n/a, 12, 12, 12, 12, 12 Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: Pengulangan Formulasi: Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan selama satru tahun
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Sub Kegiatan KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROVINSI	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi
	Sasaran Strategis: Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi Target: 2 (selama 5 tahun) Satuan: Laporan Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: penyediaan laporan pemantauan harga, laporan penyelenggaraan intervensi harga	Sasaran Strategis: Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Target: 50, 50, 50, 50, 50, 50 Satuan: Unit Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi:Jumlah lembaga usaha pangan yang difasilitasi	Sasaran Strategis: Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Target: 3 (selama 5 tahun) Satuan: Laporan Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Penyediaan laporan Fasdis, laporan sislogda, laporan stok dan pasokan	Sasaran Strategis: Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Target: 1,1,1,1,1,1 Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Jumlah Dokumen Penyaluran Cadangan Pangan Pada Daerah Rawan Pangan yang Disusun	Sasaran Strategis: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penaganan Kerawanan Pangan dan Gizi Target: 5, 2, 2, 2, 2, 2 Satuan: Laporan Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Penyediaan Laporan hasil intervensi Kerawanan Pangan dan Gizi Di Jawa Tengah	Sasaran Strategis: Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Target: n/a,1,1,1,1,1 Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Penyusunan Laporan Penyelamatan Pangan	Sasaran Strategis: Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi Target: n/a, 2, 2, 2, 2, 2 Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Penyusunan Peta SKPG
AKTIFITAS	TIM POKJA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN: 1. PEMANTAUAN HARGA PANGAN 2. PENYALURAN SUBSIDI HARGA PANGAN TINGKAT KONSUMEN & PRODUSEN 3. PENYELENGGARAAN GPM (GERAKAN PANGAN MURAH) / INTERVENSI HARGA PANGAN LAINNYA	TIM POKJA PASCAPANEN DAN KELEMBAGAAN USAHA PANGAN: 1. Fasilitasi Lembaga Usaha Pangan	TIM POKJA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN: 1. FASILITASI PENYALURAN BAHAN PANGAN DARI PRODUSEN KE KONSUMEN 2. PENYEDIAAN DATA SISLOGDA (PRODUKSI, STOK DAN PASOKAN, HARGA PRODUSEN & KONSUMEN) 3. Penyediaan data STOK DAN PASOKAN di pelaku usaha	TIM POKJA KERAWANAN PANGAN: 1. penyusunan peta FSVA 2. penaganan Desa Rawan Pangan 3. Rekomendasi penyaluran CPPD pada daerah rawan pangan		TIM POKJA PENYELAMATAN PANGAN: 1. Fasilitasi penggiat penyelematan pangan (2,3,4,5,6) penggiat 2. edukasi dan / kampanye stop boros pangan	TIM POKJA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI: 1. peta SKPG 2. intervensi stunting

Sasaran	SASARAN 3 : MENINGKATNYA PEMANFAATAN							
	Indikator Sasaran: SKOR PPH PROVINSI JAWA TENGAH (POLA PANGAN HARAPAN) Target (2025-2030) : 94.5, 94.55, 94.58, 94.6, 94.63 Satuan: ANGKA Jenis Proses Indikator: Progres Positif Formulasi: JUMLAH SELURUH SKOR PPH AKTUAL DARI 9 KELOMPOK PANGAN (PADI, UMBI, PANGAN HEWANI, MINYAK DAN LEMAK, BUAH/BIJI BERMINYAK, KACANG-KACANGAN, GULA, SAYUR DAN BUAH, LAIN-LAIN) BEDASARKAN TABEL DATA SUSENAS							
Program	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan			Bidang Kemanan Pangan			Balai Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			PROGRAM PENGAWASAN KEMANAN PANGAN				
	Sasaran Strategis: Penurunan Angka Konsumsi Beras di Provinsi Jateng Indikator Program: Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah Target (2025-2030) : 87.30, 87, 86.60, 86.30, 86 Satuan: kg/kapita/tahun Jenis Proses Indikator: PROGRES NEGATIF Formulasi: Angka Konsumsi Beras Provinsi Jateng Per Kg Per Kapita Per Tahun berdasarkan Data Susenas			Sasaran Strategis: Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan Indikator Program: Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Target (2025-2030) : 90.1, 90.2, 90.3, 90.4, 90.5 Satuan: % Jenis Proses Indikator: Progres Positif Formulasi: (60% dari bobot kinerja pengawasan keamanan PSAT di peredaran yang dihitung dari jumlah contoh pangan segar yg memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan dibagi jumlah contoh yg diawasi dikali 100%) + (40% X bobot kinerja registrasi dan sertifikasi PSAT)			Sasaran Strategis: terjaminnya pangan segar asal tumbuhan melalui sertifikasi dan registrasi Indikator Program: Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar Target (2025-2030) : 40,40,40,40,40,40 Satuan: % Jenis Proses Indikator: Pengulangan Formulasi: 40% X bobot kinerja registrasi dan sertifikasi PSAT	
Kegiatan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Kegiatan KEGIATAN PROMOSI PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI MELALUI MEDIA PROVINSI	Kegiatan PELAKSANAAN PENGAWASAN KEMANAN PANGAN SEGAR DISTRIBUSI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Sasaran Strategis: Terfasilitaasinya Kelompok / Pelaku Usaha Pengembangan Pangan Olahan Lokal dan Pangan Pokok Lokal Indikator Kegiatan: JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL YANG DIFASILITASI Target (2025-2030) : 10 Satuan: kelompok Jenis Proses Indikator: positif Formulasi: JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL YANG DIFASILITASI	Sasaran Strategis: Fasilitasi Penguatan Pangan B2SA Di Jawa Tengah Indikator Sub Kegiatan: Persentase Kabupaten Yang Terfasilitasi Penguatan Pangan B2SA Target (2025-2030) : 42, 42, 42, 42, 42 Satuan: % Jenis Proses Indikator: Formulasi: {(Kabupaten + Kota Yang Terfsilitasi) / 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah}	Sasaran Strategis: Pelaksanaan Promosi B2SA dan Pangan Lokal Indikator Kegiatan: Jumlah Pelaksanaan Promosi B2SA dan Pangan Lokal Target (2025-2030) : 7,7,7,7,7,7 Satuan: kali Jenis Proses Indikator: progres positif Formulasi: Pelaksanaan Promosi B2SA dan Pangan Lokal	Sasaran Strategis: Terselengaranya Pengawasan produk pangan segar di peredaran Indikator Kegiatan: Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran Target: 84, 84, 84, 84, 84, 84 Satuan: % Jenis Proses Indikator: Progres Postif Formulasi: (Jumlah Produk Pangan Segar yang memenuhi syarat kemanan dan mutu / Jumlah Produk Pangan Segar yang diawasai) x 100	Sasaran Strategis: Tersusunya Dokumen Rekomendasi Keamaan Pangan Segar Asal Tumbuhan Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar yang Disusun Target: 1,1,1,1,1,1 Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: pengulangan Formulasi: Jumlah rekomendasi tindak lanjut pengawasan yang disusun	Sasaran Strategis: Terlaksananya pembinaan penjaminan mutu dan keamanan pangan pada Kelompok / Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan Indikator Kegiatan: Jumlah Pelaku usaha / Kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan kemanan pangan Target: 50,50,50,50,50,50 Satuan: Pelaku Usaha / Kelompok Jenis Proses Indikator: Progres Positif Formulasi: Jumlah Pelaku usaha / kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan keamanan panga	Sasaran Strategis: Terbitnya rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan Indikator Kegiatan: Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan Target: 80, 80, 80, 80, 80, 80 Satuan: % Jenis Proses Indikator: Progres positif Formulasi: (Jumlah Sertifikasi atau Registrasi Mutu dan Keamanan Pangan yang Diterbitkan (PSATPD, SPPB PSAT, HC, PH, PRIMA, ORGANIK) / Jumlah Pengajuan Sertifikasi atau Registrasi Mutu dan Keamanan Pangan) X 100	Sasaran Strategis: Terbitnya LHU (Laporan Hasil Uji) Indikator Kegiatan: Jumlah LHU (Laporan Hasil Uji) yang diterbitkan Target: 90, 100, 100, 100, 100, 100 Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: Pengulangan Formulasi: Penerbitan LHU sesuai pengajuan
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sub Kegiatan PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	SUB KEGIATAN Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	SUB KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Sub Kegiatan PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
	Sasaran Strategis: Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal Indikator Sub Kegiatan: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Disusun Target: 1 (selama 5 tahun) Satuan: Laporan Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Penyusuanan laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Sasaran Strategis: Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Target: 1 (selama 5 tahun) Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Sasaran Strategis: Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Target: 5,5,5,5,5,5 Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sasaran Strategis: Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan Target: 1, 1, 1, 1, 1 Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Penyusunan Dokumen Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran Strategis: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Sub Kegiatan: Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kemanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Target: 1,1,1,1,1,1,1 Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Penyusunan Dokumen Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sasaran Strategis: Terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Penguatan kelembagaan pengawas kemanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Target: 1,1,1,1,1,1,1 Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Penyusunan Dokumen Penguatan Kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sasaran Strategis: Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Target: 50, 50, 50, 50, 50, 50 Satuan: Sertifikat Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Penyediaan Dokumen Rekomendasi Perizinan Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sasaran Strategis: Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Sub Kegiatan: Jumlah sarana dan prasarana pengujian kemanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Target: 1,1,1,1,1,1 Satuan: Dokumen Jenis Proses Indikator: Akumulatif Formulasi: Penyusunan Dokumen Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
AKTIFITAS	TIM POKJA PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL: 1. Fasilitasi penguatan infrastruktur pengembangan pangan lokal 2. Fasilitasi Penguatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan lokal 3. PERUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	TIM POKJA POLA KONSUMSI PANGAN B2SA : 1. ANALISIS PPH PROV JATENG 2. Fasilitasi B2SA	TIM POKJA PROMOSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN LOKAL : 1. PROMOSI PANGAN B2SA & PANGAN LOKAL	TIM POKJA PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN: 1. Pengawasan Pangan Segar 2. Pengawasan ijin edar	TIM POKJA PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN : 1. Penaganan Tindak Lanjut Pengawasan dan Aduan Masyarakat 2. Optimalisasi Pengawasan JKPD	TIM POKJA PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN : 1. Fasilitasi Peningkatan mutu dan keamanan pangan pelaku usaha pangan segar 2. pembinaan sistem manajemen pengawasan kemanan pangan OKKPD kab/kota 3. Edukasi keamanan pangan utk masyarakat	TIM POKJA SERTIFIKASI DAN REGRISTRASI PANGAN : 1. pelayanan pengawasan pre-market	TIM POKJA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMNANAN : 1. pengujian sampel pangan

Tabel Identifikasi Risiko

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan PD	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	-Prevelence of Undernourishment (PoU) -Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Ketersediaan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	Strategis OPD	- Potensi masing-masing wilayah berbeda, beberapa daerah tidak dapat menyediakan pangan yang cukup - Keterbatasan akses fisik (jarak) dan ekonomi (daya beli masyarakat rendah) - Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan B2SA	produktivitas rendah, kesehatan menurun, stunting, kemiskinan	Masyarakat Jawa Tengah

				Pangan yang tersedia tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Strategis OPD	-Minimnya edukasi masyarakat tentang pangan aman dan bergizi -Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi komitmen jaminan mutu dan keamanan pangan yang telah diterbitkan	Masyarakat mengonsumsi pangan yang tidak sesuai jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga muncul potensi keracunan pangan, penyakit kronis, dan memperburuk gizi buruk.	Masyarakat Jawa Tengah
2	Sasaran Strategis PD	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	Strategis OPD	Jawa Tengah bukan merupakan sentra produksi untuk komoditas tertentu, seperti : bawang putih, kedelai, gula dan minyak goreng.	komoditas tertentu masih didatangkan dari luar karena ketersediaan dalam daerah belum mencukupi	Masyarakat Jawa Tengah

		Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	Strategis OPD	Panjangnya rantai distribusi pangan	terjadinya inflasi	Masyarakat Jawa Tengah
			Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	Strategis OPD	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	Desa rawan pangan
		Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah	Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih dibawah/di atas angka konsumsi ideal	Strategis OPD	Pola konsumsi masyarakat belum B2SA, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal masih rendah.	Malnutrisi atau stunting, penyakit tidak menular, status gizi masyarakat.	Masyarakat Jawa Tengah

Tabel Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Bekum Ada	Uraian	Memadai/Belum memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketersediaan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	3	5	15	Ada	- Pemberian bantuan pangan - Pemberian harga subsidi pangan - Penyaluran pangan dari daerah surplus ke daerah minus bekerjasama dengan pelaku usaha dengan biaya fasilitasi distribusi pangan - Sosialisasi/ edukasi pangan B2SA dan Diversifikasi pangan lokal	Belum Memadai	3	4	12
Pangan yang tersedia tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	3	5	15	Ada	-Edukasi keamanan pangan -Surveilan ke pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi dan registrasi keamanan dan mutu pangan	Belum Memadai	3	4	12

Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	4	4	16	Ada	- Koordinasi bersama dinas terkait untuk pemantauan ketersediaan pangan di lapangan baik dari sisi hulu maupun hilir - Analisa Ketersediaan Pangan secara berkala untuk mengetahui komoditas yang masih kurang pemenuhannya. Analisa dilakukan bersama dengan BPS selaku Pembina Data	Belum Memadai	4	3	12
Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	4	5	20	Ada	Intervensi harga	Belum memadai	4	4	16
Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	4	3	12	Ada	Subsidi harga pangan	Belum memadai	3	3	9
Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih	4	5	20	Ada	Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat dan anak sekolah, Promosi pangan B2SA dan	Belum memadai	4	4	16

dibawah/di atas angka konsumsi ideal					pangan lokal, Lomba cipta olahan pangan lokal, Lomba sekolah cerdas pangan, promosi melalui video/poster/pameran.				

Tabel Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Ketersediaan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	12	Kepala Dinas	- Potensi masing-masing wilayah berbeda, beberapa daerah tidak dapat menyediakan pangan yang cukup - Keterbatasan akses fisik (jarak) dan ekonomi (daya beli masyarakat rendah) - Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan B2SA	produktivitas rendah, kesehatan menurun, stunting, kemiskinan
Pangan yang tersedia tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	12	Kepala Dinas	-Minimnya edukasi masyarakat tentang pangan aman dan bergizi -Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi komitmen jaminan mutu dan keamanan pangan yang telah diterbitkan	Masyarakat mengonsumsi pangan yang tidak sesuai jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga muncul potensi keracunan pangan, penyakit kronis, dan memperburuk gizi buruk.
Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	12	Kepala Dinas	Jawa Tengah bukan merupakan sentra produksi untuk komoditas tertentu, seperti : bawang putih,	komoditas tertentu masih didatangkan dari luar karena ketersediaan dalam

			kedelai, gula dan minyak goreng.	daerah belum mencukupi
Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	16	Kepala Dinas	Panjangnya rantai distribusi pangan	terjadinya inflasi
Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	9	Kepala Dinas	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah
Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih dibawah/di atas angka konsumsi ideal	16	Kepala Dinas	Pola konsumsi masyarakat belum B2SA, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal masih rendah.	Malnutrisi atau stunting, penyakit tidak menular, status gizi masyarakat.

Tabel Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan PD								
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	-Prevelence of Undernourishment (PoU) -Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Ketersediaan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	12	- Potensi masing-masing wilayah berbeda, beberapa daerah tidak dapat menyediakan pangan yang cukup - Keterbatasan akses fisik (jarak) dan ekonomi (daya beli masyarakat rendah) - Pola konsumsi masyarakat	produktivitas rendah, kesehatan menurun, stunting, kemiskinan	- Pemberian bantuan pangan dan penyaluran komoditas pangan secara kontinyu dan tidak hanya pada komoditas pangan strategis - Pemberian subsiidi harga pangan utuk masyarakat rawan pangan dan anak berseiko stunting, kegiatan berbagi pangan, koordinasi dengan Bappeda dan OPD untuk penanganan di	Kepala Dinas	2025-2029

				belum menerapkan B2SA		luar aspek pangan - Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA yang lebih masif. Penganekaragaman dalam mengkonsumsi pangan berbahan baku potensi pangan spesifik lokasi, Fasilitasi pelaku usaha pangan lokal. Pengembangan pangan lokal. Gerakan cinta pangan lokal.		
		Pangan yang tersedia tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	12	-Minimnya edukasi masyarakat tentang pangan aman dan bergizi -Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi	Masyarakat mengonsumsi pangan yang tidak sesuai jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga muncul potensi keracunan	-Edukasi keamanan pangan di wilayah POU Tinggi -Pelaporan dan tindak lanjut hasil surveilan	Kepala Dinas	2025-2029

				komitmen jaminan mutu dan keamanan pangan yang telah diterbitkan	pangan, penyakit kronis, dan memperburuk gizi buruk.			
Sasaran Strategis PD								
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	12	Jawa Tengah bukan merupakan sentra produksi untuk komoditas tertentu, seperti : bawang putih, kedelai, gula dan minyak goreng.	komoditas tertentu masih didatangkan dari luar karena ketersediaan dalam daerah belum mencukupi	- Koordinasi dengan Dinas Teknis Produksi untuk optimalisasi produksi komoditas pangan yang masih kurang - Pemenuhan kebutuhan pangan yang tidak dapat diproduksi sendiri, dengan impor mendatangkan dari daerah lain baik domestik maupun luar negeri	Kepala Dinas	2025-2029
Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	Harga komoditas pangan strategis	16	Panjangnya rantai distribusi pangan	terjadinya inflasi	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2025-2029

		mengalami fluktuasi tajam						
	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	9	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	Koordinasi dengan Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yang membutuhkan bantuan di luar aspek pangan	Kepala Dinas	2025-2029
Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah	Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih dibawah/diatas angka konsumsi ideal	16	Pola konsumsi masyarakat belum B2SA, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal masih rendah.	Malnutrisi atau stunting, penyakit tidak menular, status gizi masyarakat.	Koordinasi dengan dinas teknis untuk meningkatkan produksi pangan lokal, Rakor analisis skor PPH dengan kabupaten/kota, Sosialissi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA, Pengenalan pangan lokal substitusi beras dan gandum, promosi pangan lokal melalui	Kepala Dinas	2025-2029

						media dan pameran, fasilitasi alat bagi pelaku usaha pangan lokal. Pemanfaatan pangan lokal yang lebih masif.		

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen nasional dan global dalam menjawab tantangan lingkungan hidup, perubahan iklim, serta kelestarian sumber daya alam. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas industri yang terus meningkat menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat strategis dalam mengawal dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mendukung dokumen tersebut, setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai arah kebijakan dan rencana kerja selama lima tahun.

Dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025–2030, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 untuk menjabarkan visi, misi, dan program unggulan kepala daerah. Penyusunan Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara paralel dengan proses RPJMD tersebut, dan sepenuhnya berpedoman pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 secara substansial merupakan penjabaran operasional dari kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah yang mengusung arah pembangunan: "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari." Visi pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah, yaitu: “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045”, diterjemahkan ke dalam tujuan daerah “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan” dan sasaran daerah yang mencakup: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah; Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berbasis Lingkungan; dan Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Untuk mendukung capaian tujuan tersebut, DLHK Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu: “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor

kehutanan." Sasaran strategis yang mendukung tujuan ini meliputi: Menurunnya pencemaran udara; Menurunnya pencemaran air permukaan; Meningkatnya kualitas lahan; Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati; dan Bertumbuhnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor kehutanan.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Jawa Tengah juga mendukung arah kebijakan nasional dimana visi pembangunan kehutanan 2025-2029 "Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dan Berkelanjutan Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau" dan visi pembangunan lingkungan hidup 2025-2029 "Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045".

Akhirnya, dokumen Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum untuk menyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);

20) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, Dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
21) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 161);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13120;
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);
29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 4);

30) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 33);
31) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
32) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (4-94/2023), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (1-26/2024), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);
36) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 66 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (9-221/2024), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
37) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (5-66/2025), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
38) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
39) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan

dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang dapat memastikan arah kinerja menuju tercapainya sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jawa Tengah.

b. TUJUAN

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tujuan :

1) Mengidentifikasi isu - isu strategis bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan keterkaitannya dengan isu strategis pembangunan daerah dan isu strategis Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat nasional;
2) Merumuskan indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
3) Merumuskan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan indikatif untuk mencapai sasaran strategis/indikator kinerja utama;
4) Meningkatkan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah; dan
5) Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II Gambaran Layanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, serta permasalahan pelayanan perangkat daerah,

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menggambarkan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah, manajemen risiko strategis perangkat daerah.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah

BAB V Penutup

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan, Pemanfaatan, dan Penyuluhan Kehutanan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan, Pemanfaatan, dan Penyuluhan Kehutanan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan, Pemanfaatan, dan Penyuluhan Kehutanan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

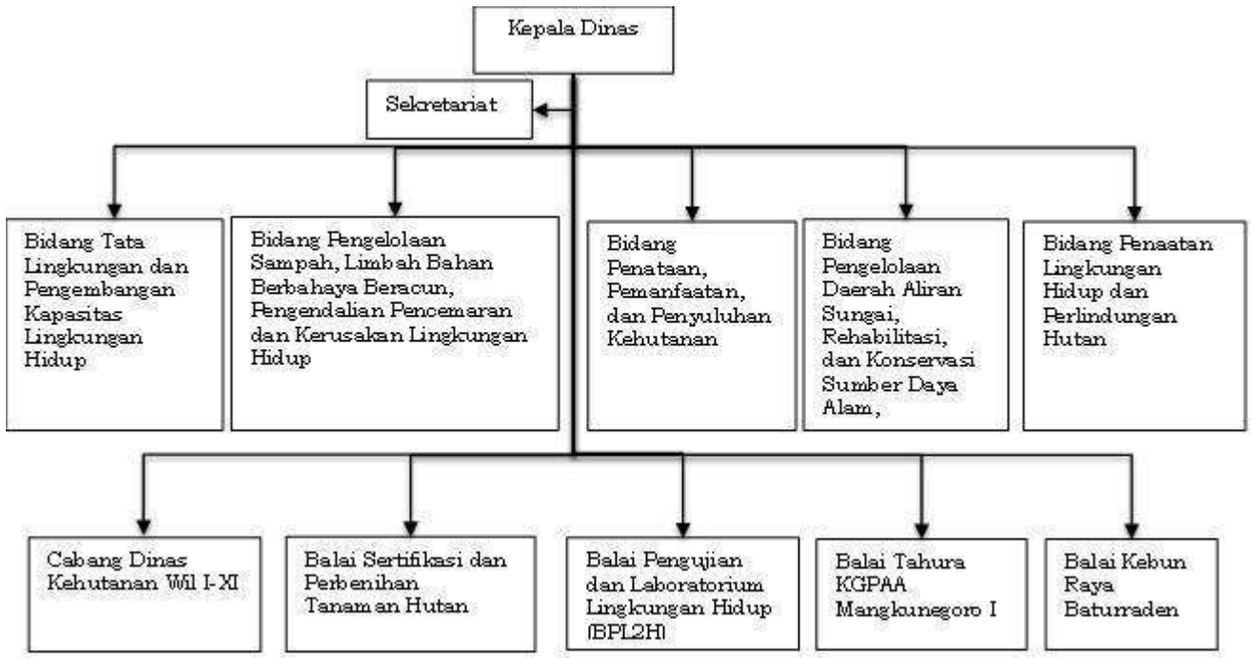

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kepala Dinas, membawahkan:

a. Sekretariat;
b. Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
d. Bidang Penataan, Pemanfaatan, dan Penyuluhan Kehutanan;
e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam;
f. Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
g. Cabang Dinas;
h. UPT Dinas;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatan di Lingkungan Dinas;
c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
e. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas; dan
g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian;

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum Dan Kepegawaian melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2.1.3 Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Tata Lingkungan Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Lingkungan Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup;

c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup; dan
d. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dang fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1) Kelompok Kerja Penataan Lingkungan Hidup;
2) Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup;
3) Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas Dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup;

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

1) Kelompok Kerja Penataan Lingkungan Hidup

   Kelompok Kerja Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup.
2) Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup

   Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup.
3) Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas Dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup

   Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas Dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup.

2.1.4 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1) Kelompok Kerja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
2) Kelompok Kerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
3) Kelompok Kerja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Kelompok Kerja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

   Kelompok Kerja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas, Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun.
2) Kelompok Kerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

   Kelompok Kerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas, melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
3) Kelompok Kerja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

   Kelompok Kerja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas, melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

2.1.5 Bidang Penataan, Pemanfaatan, dan Penyuluhan Kehutanan

Bidang Penataan, Pemanfaatan, dan Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan

pemanfaatan hutan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penataan, Pemanfaatan, dan Penyuluhan Kehutanan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan kebijakan bidang penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan;
b. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan;
c. Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan bidang penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan;
d. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan, bidang penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan;
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan;
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pemanfaatan dan penyuluhan kehutanan;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan kebijakan bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam;
b. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam;
c. Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam;
d. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan, bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam;
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan dan konservasi sumber daya alam;
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7 Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan

Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penaatan lingkungan hidup dan perlindungan hutan;
b. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan, terdiri dari:

1) Kelompok Kerja Penyuluhan;
2) Kelompok Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Ketua Penyuluhan
   Kelompok Kerja Penyuluhan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.
2) Kelompok Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
   Kelompok Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2.1.8 Cabang Dinas Kehutanan

Dalam melaksanakan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas LHK membentuk Cabang Dinas (Kelas A) yang dipimpin oleh Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Cabang Dinas Kehutanan sebanyak 11 (sebelas), yaitu:

a. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I berkedudukan di Kabupaten Blora, dengan wilayah kerja Kab. Blora dan Kab. Rembang;
b. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah II berkedudukan di Kabupaten Pati, dengan wilayah kerja Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, dan Kab. Demak;
c. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah III berkedudukan di Kabupaten Semarang, dengan wilayah kerja Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Boyolali dan Kota Salatiga;

d. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah IV berkedudukan di Kota Pekalongan, dengan wilayah kerja Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Kendal dan Kab. Batang;
e. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah V berkedudukan di Kota Tegal, dengan wilayah kerja Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, dan Kab Brebes;
f. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VI berkedudukan di Kabupaten Banyumas dengan wilayah kerja Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, dan Kab. Purbalingga;
g. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara, dengan wilayah kerja Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo;
h. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII berkedudukan di Kabupaten Kebumen, dengan wilayah kerja Kab. Kebumen dan Kab. Purworejo;
i. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah IX berkedudukan di Kota Magelang, dengan wilayah kerja Kota Magelang, Kab. Magelang, dan Kab. Temanggung;
j. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X berkedudukan di Kota Surakarta, dengan wilayah kerja Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Karanganyar, dan Kab. Sragen;
k. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah XI berkedudukan di Kabupaten Wonogiri, dengan wilayah kerja Kab. Wonogiri dan Kab. Sukoharjo.

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sub urusan kehutanan di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas, Cabang Dinas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya;
d. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas terdiri dari:

a. Kepala Cabang Dinas
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Penyuluhan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan;
d. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.9 Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan teknis operasional tertentu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah didukung 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah, yaitu:

2.1.9.1 Balai Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup A

Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengujian kualitas lingkungan, dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A melaksanakan fungsi:

a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengujian Kualitas Lingkungan, Dan Pengendalian Mutu Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan;
b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Pengujian Kualitas Lingkungan, Dan Pengendalian Mutu Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan;
c. Evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengujian Kualitas Lingkungan, Dan Pengendalian Mutu Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan;
d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Balai;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Kelompok Kerja Pengujian Kualitas Lingkungan;
d. Kelompok Kerja Pengendalian Mutu dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.9.2 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I

Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I. Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Penataan, Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya, meliputi:

a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang Penataan, Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya;
b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Penataan, Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya.;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan, Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya.;

d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A, terdiri atas:
a. Kepala Balai;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Kelompok Kerja Pemanfaatan;
d. Kelompok Kerja Konservasi Sumber Daya Alam;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.9.3 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perbenihan tanaman hutan. Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih, dan sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan;
b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih, dan sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan;
c. Evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih, dan sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan;
d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan terdiri atas:
a. Kepala Balai;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Kelompok Kerja Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Benih;
d. Kelompok Kerja Sertifikasi Dan Pengendalian Peredaran Benih Dan Bibit;
e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Subbagian dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Sedangkan seksi-seksi, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

2.1.9.4 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B

Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden, meliputi:

a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang konservasi tumbuhan dan pemanfaatan kebun raya;
b. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang konservasi tumbuhan dan pemanfaatan kebun raya;
c. Menyiapkan penyusunan rencana pengelolaan dan penataan kawasan Kebun Raya Baturraden;
d. Menyiapkan perlindungan dan pengamanan di kawasan Balai Kebun Raya Baturraden;
e. Menyiapkan pengawetan genetik dan jenis tumbuhan di kawasan Balai Kebun Raya Baturraden;
f. Menyiapkan pemeliharaan kawasan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan di Balai Kebun Raya Baturraden;
g. Menyiapkan pemeliharaan dan pengembangan koleksi tumbuhan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan, dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan,
h. Menyiapkan pengembangan data base dan sistem informasi pengelolaan Balai Kebun Raya Baturraden;
i. Menyiapkan dukungan teknis pada dinas terkait pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebun raya yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota;
j. Menyiapkan pemanfaatan kawasan dan koleksi tumbuhan untuk kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan, wisata alam dan jasa lingkungan di kebun raya baturraden;
k. Menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan pemanfaatan di kawasan Balai Kebun Raya Baturraden;
l. Menyiapkan pengendalian pengusahaan pariwisata alam di kawasan Balai Kebun Raya Baturraden;
m. Menyiapkan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan/pemanfaatan Balai Kebun Raya Baturraden;
n. Menyiapkan pengembangan sistem informasi pelayanan pemanfaatan Kebun Raya Baturraden;
o. Menyiapkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Balai Kebun Raya Baturraden;
p. Menyiapkan penerimaan pendapatan daerah dari pemanfaatan kawasan Balai Kebun Raya Baturraden;
q. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Balai Kebun Raya; dan
r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Susunan organisasi Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B, terdiri atas:
1) Kepala Balai;
2) Subbagian Tata Usaha;
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah saat ini didukung oleh sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Sampai dengan bulan Juni tahun 2025, jumlah sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 761 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 665 orang dan tenaga non PNS sebanyak 96. Berikut PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Golongan IV	151
2.	Golongan III	417
3.	Golongan II	28
4.	Golongan I	2
5.	Golongan IX / PPPK	58
6.	CPNS	0
7.	Non PNS	93
	Jumlah	748

Sumber: DLHK Tahun 2025

Tabel 2.2
Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1.	S3	1
2.	S2	106
3.	S1/D4	445
4.	Sarmud/D3/D2/D1	47
5.	SLTA	51
6.	SLTP	4
7.	SD	2
	Jumlah	656

Sumber: DLHK Tahun 2025

Tabel 2.3
Data ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	436
2.	Perempuan	220
	Jumlah	656

Sumber: DLHK Tahun 2025

Dalam pelaksanaan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sarana dan prasarana berupa aset yang tersebar di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah maupun kantor Cabang Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis. Kondisi aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Tanah sebanyak 20 unit;
2. Bangunan sebanyak 208 unit;

3. Kendaraan roda empat sebanyak 49 unit;
4. Kendaraan roda dua sebanyak 59 unit;
5. Alat-alat besar sebanyak 29 unit;
6. Alat-alat kantor dan rumah tangga sebanyak 4.408 unit;
7. Alat-alat studio dan komunikasi sebanyak 496 unit;
8. Alat-alat laboratorium sebanyak 318 unit;
9. Perahu sebanyak 1 unit;
10. Jalan, irigasi serta jaringan sebanyak 92 unit; dan
11. Barang Lainnya sebanyak 3.680 unit.

Selain didukung dengan sarana dan prasarana berupa aset, beberapa inovasi teknologi informasi yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan antara lain:

1. Sistem Informasi Dinas LHK, Website utama Dinas LHK Aplikasi ini disediakan untuk memberikan informasi dan profil dinas. Website dapat ini menyajikan berbagai informasi, mulai dari berita, panduan, hingga data dan dokumentasi. Sebagai komunikasi antara pemilik website dengan pengunjung, serta antar pengguna website. Sistem informasi ini dirancang dengan baik dan profesional dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pengguna terhadap suatu organisasi perangkat daerah. Sistem ini dapat diakses melalui tautan http://dlhk.jatengprov.go.id.
2. Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
   Aplikasi ini disediakan untuk memberikan informasi pejabat pengelola informasi daerah pada Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah. Sistem ini dapat diakses melalui http://ppid.dlhk.jatengprov.go.id.
3. Aplikasi Sibetah Sistem Informasi Perbenihan Tanaman Hutan (SI-Betah) menyajikan fitur pelayanan sertifikasi, fitur pelayanan informasi dan fasilitasi bibit, serta pelaporan penatausahaan benih/bibit secara mandiri. Tampilan aplikasi dengan fitur-fitur sederhana, ringkas, dan mudah dipahami dapat meningkatkan responsivitas dan kepuasan pengguna. Fitur aplikasi dapat diakses melalui media elektronik sehingga dapat memenuhi preferensi pengguna yang melakukan aktivitas sehari hari menggunakan ponsel. Penggunaan Sistem Informasi Perbenihan Tanaman Hutan (SI-Betah) pada tugas/pekerjaan Balai dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital dan memberikan kontribusi terhadap penerapan teknologi informasi di pemerintahan dapat diakses melalui tautan https://sibetah.jatengprov.go.id.
4. Aplikasi Sikajeng adalah Sikajeng adalah singkatan dari Sistem Informasi Kehutanan Jawa Tengah. Ini adalah aplikasi yang digunakan di Jawa Tengah untuk mengelola informasi kehutanan. Aplikasi Sikajeng memungkinkan berbagai pihak yang terlibat dalam sektor kehutanan, seperti penyuluh, KTH (Kelompok Tani Hutan), industri perkayuan, dan penjual kayu, untuk mengakses dan memanfaatkan informasi Sistem Informasi Kehutanan Jawa Tengah Merupakan sebuah sistem aplikasi berbasis web GIS dan android yang relevan dapat diakses pada tautan https://sikajeng.dlhk.jatengprov.go.id/.

5. Aplikasi Sidiajeng Sidiajeng merupakan Sistem Informasi Adiwiyata Jawa Tengah yang telah dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022. Sistem Informasi ini disusun dengan berbasis web dan spasial. Sistem informasi Sidiajeng ini mempermudah proses penilaian sekolah adiwiyata, yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. SIDIAJENG adalah Sistem Informasi Adiwiyata Jawa Tengah. Ini adalah platform digital yang bertujuan untuk mengajak masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah, untuk memilah dan mengumpulkan sampah secara mandiri, serta mendukung gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). SIDIAJENG mempermudah sekolah dalam meraih penghargaan Adiwiyata dengan menyediakan informasi dan sarana untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Selain itu, SIDIAJENG juga merupakan bagian dari berbagai inovasi yang diciptakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi masalah lingkungan dan dapat diakses pada tautan https://sidiajeng.id/.
6. Aplikasi Silebah Emas Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Kehutanan Jawa Tengah (SIKAJENG) dengan menambahkan fitur Sistem Informasi Pengelolaan Online Hibah dan Bantuan Kepada Masyarakat (SILEBAH EMAS). Penerima Hibah dan Bantuan kepada Masyarakat salah satu persyaratannya adalah Kelompok Tani Hutan sudah diregister pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH) Pusat Penyuluhan Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan serta diusulkan oleh Penyuluh Kehutanan dan telah diverifikasi oleh Cabang Dinas Kehutanan melalui aplikasi SILEBAH EMAS. Langkah ini bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan Publik, khususnya pelayanan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) di Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan hibah dan belanja kepada masyarakat perlu ditingkatkan dalam aspek kecepatan, keakuratan, akuntabilitas, dan efektifnya dalam pelaksanaannya. Pengelolaan data hibah ini dibangun berbasis website.

   Aplikasi SILEBAH EMAS diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Penyuluh Kehutanan dalam rangka peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan Tingkat Nasional melalui SIMLUH di Kementerian Kehutanan. Diharapkan dengan penggunaan aplikasi ini dapat terwujudnya pelaksanaan hibah yang cepat dan akuntabel untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya dalam mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dapat diakses pada tautan https://sikajeng.dlhk.jatengprov.go.id/hibah/.
7. Desa Mandiri Sampah adalah Desa yang mampu melakukan pengelolaan sampahnya secara mandiri sehingga hanya residu yang harus dikelola lebih lanjut ke TPA setempat untuk mendukung tercapainya target pengurangan dan penanganan sampah. Tujuan utama Desa Mandiri Sampah di Jawa Tengah adalah untuk menciptakan lingkungan yang

bersih, sehat, dan berkelanjutan dengan mengelola sampah secara mandiri di tingkat desa.

Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik. Berikut adalah beberapa tujuan lebih detail dari Desa Mandiri Sampah:

a. Pengurangan Volume Sampah ke TPA
   Dengan mengelola sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik didaur ulang, desa dapat mengurangi jumlah sampah yang perlu diangkut ke TPA.
b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
   Program ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga hingga pengolahan sampah menjadi produk bernilai.
c. Penciptaan Lingkungan Bersih dan Sehat
   Pengelolaan sampah yang baik dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat desa, serta mengurangi risiko dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan.
d. Pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai
   Sampah organik dapat diolah menjadi kompos untuk pertanian, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi produk baru, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi desa.
e. Pengembangan ekonomi lokal
   Adanya kegiatan daur ulang sampah dapat membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja di tingkat desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
f. Peningkatan Kualitas Hidup
   Dengan lingkungan yang bersih, sehat, dan ekonomi yang lebih baik, diharapkan kualitas hidup masyarakat desa juga meningkat.
g. Mendukung Program Nasional
   Desa Mandiri Sampah sejalan dengan program nasional seperti Kampung Iklim (Proklim) dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, Desa Mandiri Sampah diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan sampah di Jawa Tengah dan berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih baik. Penghargaan Desa Mandiri Sampah adalah apresiasi yang akan diberikan kepada desa yang mampu melakukan pengelolaan sampah secara mendiri maksimal di wilayah desa setempat.

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan urusan lingkungan hidup dalam kurun waktu 2018 - 2024 merujuk pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan urusan lingkungan di Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi: layanan jasa uji kualitas lingkungan, layanan perizinan lingkungan, layanan informasi kualitas air, layanan informasi kualitas udara, layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat/sengketa lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan. Layanan ini diharapkan memberikan jaminan terhadap keberlangsungan makhluk hidup, kelestarian ekosistem serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga kualitas lingkungan hidup tetap terjaga.

Selanjutnya capaian kinerja urusan lingkungan hidup dan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 Dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dalam mendukung pencapaian misi ke-3 (tiga) diarahkan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta misi ke-4 (empat) diarahkan untuk menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Dalam mewujudkan capaian sasaran strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018-2023 Dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024-2026 terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang telah dicapai secara rinci

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indeks Kualitas Air	**Angka**		√		**49,17**	**49,47**	**49,77**	**50,07**	**50,66**	**50,52**	**50,55**	**50,63**	**50,63**	**52,03**	102.75	102.18	101.73	101,12	102,70
	Indeks Kualitas udara	**Angka**		√		**84,71**	**84,91**	**85,01**	**85,01**	**85,01**	**84,73**	**84,60**	**85,14**	**85,14**	**87,73**	100.02	99.63	100.15	100,16	103,20
	Indeks Pencemaran Air	Angka				3,45	3,45	3,45	3,45	3,37	3,40	3,39	3,17	3,39	3,35	101,4	101,7	108,1	101,76	100,60
	Indeks Pencemar SO2 dan NO2	Angka				0,20	0,20	0,20	0,20	0,37	0,2	0,20	0,20	0,20	0,32	100	100	100	100	115,62
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya (Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup)	%				5	5	10	10	10	5	5	10	10	10	100	100	100	100	100
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara	%				5,71	5,71	8,57	8,57	8,57	5,71	5,71	8,57	8,57	8,57	100	100	100	100	100
	Persentase pengujian kualitas air (Balai Pengujian Dan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Laboratorium Lingkungan Hidup)																			
	Persentase pemantauan kualitas udara	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka		√		**66,76**	**51,15**	**51.20**	**51,25**	**42,45**	**41,03**	**41,51**	**42.45**	**46,34**	**48,37**	76.59	76.63	61.41	90,42	113,94
	Luas Tutupan Lahan (LTV)	Km2				16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	10.224,57	10.222,6	10.224,57	10.224,57	10.224,57	10.224,57	61.75	61.76	61.76	61,76	100
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam)	%		√		10	15	20	25	0,86	11,83	17.75	22,64	25	1,00	118.30	118.33	113.20	100	125
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (CDK 1)	%		√		0,65	0,98	1,30	1,63	0,02	0,95	1.13	1,38	1,63	0,02	98.46	115.31	106.15	100	100
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (CDK 2)	%		√		0,65	0,98	1,30	1,63	0,08	0,90	1.27	1,50	1,63	0,08	140	129.59	115.38	100	100
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (CDK 3)	%		√		0,68	1,01	1,35	1,69	0,08	0,82	1.29	1,69	1,69	0,14	120.59	127.72	125.19	100	100
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (CDK 4)	%		√		0,73	1,09	1,45	1,81	0,04	1,14	1.55	1,68	1,81	0,05	142.47	142.20	115.86	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (CDK 5)	%		√		0,80	1,20	1,60	2,00	0,04	0,76	1.03	1,54	2,00	0,11	88.75	85.83	96.25	100	100
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (CDK 6)	%		√		1,30	1,95	2,60	3,25	0,15	1,00	1.56	2,40	3,25	0,15	76.92	80	92.31	100	100
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani CDK 7)	%		√		1,25	1,88	2,50	3,13	0,16	1,44	3	3,34	3,34	0,16	100	159.57	133.60	100	100
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (CDK 8)	%		√		0,83	1,24	1,65	2,06	0,07	1,03	1.51	1,88	2,06	0,12	122.89	121.77	113.94	100	100
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (CDK 9)	%		√		1,05	1,58	2,10	2,63	0,09	1,41	1.82	2,19	2,63	0,14	134.29	115.19	104.29	100	100
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (CDK 10)	%		√		0,83	1,24	1,65	2,06	0,07	1,43	1,90	2,00	2,41	0,08	91.57	153.23	146.06	100	100
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (CDK 11)	%		√		1,25	1,88	2,50	3,13	0,06	0,80	1,69	2,62	3,13	0,06	85.60	89.89	104.80	100	100
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan	%				10	15	20	25	2,5	10	15	20	20	2,5	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Hidupdan Perlindungan Hutan)																			
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 1	%				1,20	1,80	2,40	3	0,3	1,20	1,80	2,40	2,40	0,3	100	100	100	100	100
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 2)	%				0,80	1,20	1,60	2	0,2	0,84	1,20	1,60	1,60	0,2	105	100	100	100	100
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 3)	%				0,80	1,20	1,60	2	0,2	0,84	1,20	1,60	1,60	0,2	105	100	100	100	100
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 4)	%				0,80	1,20	1,60	2	0,2	0,60	1,20	1,60	1,60	0,2	75	100	100	100	100
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 5)	%				1,20	1,80	2,40	3	0,3	1	1,80	2,40	2,40	0,3	83.33	100	100	100	100
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 6)	%				0,80	1,20	1,60	2	0,2	0,84	1,20	1,60	1,60	0,2	105	100	100	100	100
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 7)	%				1,20	1,80	2,40	3	0,3	1,20	1,80	2,40	2,40	0,3	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 8)	%				0,80	1,20	1,60	2	0,2	0,80	1,20	1,60	1,60	0,2	100	100	100	100	100
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 9)	%				0,80	1,20	1,60	2	0,2	0,84	1,20	1,60	1,60	0,2	105	100	100	100	100
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 10)	%				0,80	1,20	1,60	2	0,2	0,80	1,20	1,60	1,60	0,2	100	100	100	100	100
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (CDK 11)	%				0,80	1,20	1,60	2	0,2	0,84	1,20	1,60	1,60	0,2	105	100	100	100	100
	Persentase pengaduan yang ditangani (Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengaduan yang ditangani (CDK 1)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengaduan yang ditangani (CDK 2)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengaduan yang ditangani (CDK 3)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengaduan yang ditangani (CDK 4)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase pengaduan yang ditangani (CDK 5)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengaduan yang ditangani (CDK 6)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengaduan yang ditangani (CDK 7)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengaduan yang ditangani (CDK 8)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengaduan yang ditangani (CDK 9)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengaduan yang ditangani (CDK 10)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengaduan yang ditangani (CDK 11)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	Angka				0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	2,68	0,47	4,61	4,61		570.21	100	980.85	100	100
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan)	%				11,90	19,18	27,08	35,38	35,40	10,79	17,76	27,08	35,38	35,40	90.67	92.60	100	100	100
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 1)	%				0,41	0,51	0,62	0,72	1,38	0,41	0,51	0,62	0,72	1,38	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 2)	%				0,41	0,51	0,62	0,72	1,72	0,41	0,51	0,62	0,72	1,72	100	100	100	100	100
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 3)	%				0,31	0,41	0,51	0,62	1,64	0,31	0,41	0,51	0,62	1,64	100	100	100	100	100
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 4)	%				0,41	0,51	0,62	0,72	1,46	0,41	0,51	0,62	0,72	1,46	100	100	100	100	100
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 5)	%				0,51	0,62	0,72	0,82	1,29	0,51	0,62	0,72	0,82	1,29	100	100	100	100	100
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 6)	%				0,51	0,62	0,72	0,82	2,15	0,51	0,62	0,72	0,82	2,15	100	100	100	100	100
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 7)	%				0,51	0,62	0,72	0,82	1,55	0,51	0,62	0,72	0,82	1,55	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 8)	%				0,31	0,41	0,51	0,62	1,03	0,31	0,41	0,51	0,62	1,03	100	100	100	100	100
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 9)	%				0,41	0,51	0,62	0,72	1,46	0,41	0,51	0,62	0,72	1,46	100	100	100	100	100
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 10)	%				0,31	0,41	0,51	0,62	1,03	0,31	0,41	0,51	0,62	1,03	100	100	100	100	100
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (CDK 11)	%				0,31	0,41	0,51	0,62	1,29	0,31	0,41	0,51	0,62	1,29	100	100	100	100	100
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka				**79**	**81**	**83**	**85**	**85**	**90,75**	**96,50**	**87,88**	**86,13**	**89,25**	114.87	119.14	105.88	101,32	105
	Nilai SAKIP PD	Angka				80	80	81	81	81	80,86	80	83,24	83,24	83,10	101.08	100	102.77	102,76	102,59
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (CDK 1)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (CDK 2)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (CDK 3)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (CDK 4)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (CDK 5)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (CDK 6)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (CDK 8)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (CDK 9)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (CDK 10)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (CDK 11)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (CDK 7)	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 2.3.1, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah memiliki 10 (sepuluh) indikator kinerja utama yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelayanan, antara lain:

1. Indeks kualitas air
2. Indeks kualitas udara
3. Indeks pencemaran air
4. Indeks pencemaran SO2 dan NO2
5. Indeks kualitas tutupan lahan
6. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB
7. Luas tutupan lahan
8. Pertumbuhan PDRB sub sektor kehutanan
9. Nilai kepuasan masyarakat
10. Nilai sakip perangkat daerah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa pada tahun ke empat renstra terdapat 5 (lima) indikator kinerja memiliki capaian yang tinggi pada kisaran ≥100%, yaitu indikator Indeks kualitas air, Indeks pencemaran SO2 dan NO2, Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB, Pertumbuhan PDRB sub sektor kehutanan dan Nilai kepuasan masyarakat. Sementara 5 (lima) indikator lainnya memiliki capaian pada kisaran 60%-99%, dengan indikator Luas tutupan lahan (LTV) yang memiliki capaian paling rendah yaitu sebesar 61,75%. Adapun indikator kinerja yang capaiannya masih dibawah 100% disebabkan adanya kebijakan refocusing yang berdampak pada pengurangan anggaran kegiatan sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, sementara kegiatan yang sifatnya aksi dan membutuhkan peran publik sangat dibatasi untuk menghindari adanya kegiatan kerumunan massa.

Dalam mewujudkan sasaran strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, telah teralokasi anggaran APBD Jawa Tengah selama 5 tahun sebesar Rp.1.041.682.726.000 atau rata-rata per tahun 208 Milyar rupiah. Data anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti terdapat pada tabel 2.1.2

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp.000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/ Sampai dengan tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan	3.397.525	4.715.950	5.252.000	6.022.200	4.200.000	3.397.525	4.715.950	5.252.000	6.022.200	4.200.000	4.051.698	56.209	5.473.946	6.022.200	2.647.593	119	106	104	100	63,04	2,94	4,18
2	Belanja	115.382.553	149.513.327	172.847.991	193.502851	195.914.546	160.407.006	180.039.387	196.755.806	267.196.284	195.914.546	152.368.549	177.422.266	192.539.808	267.196.284		94,99	98,55	97,86	100	97.04	2,52	3,29

Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 2.2, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan positif, yaitu 2,52% untuk pertumbuhan anggaran dan 3,29% untuk pertumbuhan realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan anggaran belanja langsung meskipun pagu anggaran per tahun fluktuatif.

2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi SKPD/ OPD dalam pelayanannya berdasarkan tugas dan fungsinya, maka dilakukan identifikasi permasalahan dari aspek lingkungan internal, yakni kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kedua aspek tersebut menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan yang akan dilakukan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelanggan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya secara rinci dijelaskan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Lingkungan Hidup			
1	1. Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup (air dan udara)	1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran air permukaan	a. Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha /kegiatan b. Masih kurangnya pengawasan terhadap izin lingkungan pelaku usaha/kegiatan c. Masih lemahnya kepatuhan terhadap regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup d. Belum optimalnya pemantauan dan pengujian kualitas air permukaan e. Masih kurangnya sarana prasarana dan inovasi teknologi pengolah limbah pelaku usaha/kegiatan f. Masih banyaknya pengaduan lingkungan hidup

No.	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup	a. Belum optimalnya penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat b. Masih kurangnya Gerakan peduli lingkungan kepada masyarakat c. Masih rendahnya kapasitas kelompok masyarakat peduli lingkungan d. Masih rendahnya pemahaman identifikasi dan pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha/kegiatan
		3. Meningkatnya emisi gas rumah kaca	a. Masih kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau di perkotaan b. Masih rendahnya luasan lahan yang direhabilitasi c. Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha /kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi GRK d. Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pengendalian penurunan emisi GRK e. Masih rendahnya kapasitas masyarakat dalam penurunan emisi GRK
		4. Belum optimalnya pengelolaan sampah	a. Belum tersedianya TPA/TPST Regional yang memadai b. Masih kurangnya sarpras pengelolaan sampah yang memadai c. Masih rendahnya kapasitas/kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah d. Masih rendahnya inovasi dan teknologi pengelolaan sampah e. Masih rendahnya koordinasi pengelolaan sampah dan limbah B3 antar Kab/Kota
	2. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup	1. Meningkatnya ancaman kehilangan	a. Meningkatnya kerusakan habitat b. Belum optimalnya pemanfaatan

No.	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		keanekaragaman hayati	keanekaragaman hayati yang inklusif dan berkelanjutan c. Masih rendahnya kapasitas kelompok masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
		2. Menurunnya luasan tutupan lahan	a. Masih rendahnya lahan kritis yang ditangani b. Masih rendahnya kapasitas pengelolaan DAS c. Masih adanya kerusakan hutan
		3. Masih rendahnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	a. Masih rendahnya aksi adaptasi perubahan iklim
Kehutanan			
2	1. Pengelolaan hutan belum berkelanjutan	1. Masih rendahnya tertib penggunaan Kawasan hutan	1. Belum tersedianya data informasi terkait penggunaan kawasan hutan yang memadai 2. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan hutan. 3. Belum optimalnya pelayanan perizinan penggunaan Kawasan hutan 4. Masih adanya potensi konflik tenuriall
		2. Masih rendahnya tertib pemanfaatan hasil hutan	a. Belum tersedianya data informasi terkait pemanfaatan hasil hutan b. Belum optimalnya pembinaan/pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan c. Belum optimalnya pelayanan perizinan pemanfaatan hasil hutan d. Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan
	3. Masih rendahnya	1. Belum tertatanya unit	a. Belum tersedianya data informasi potensi hutan rakyat

No.	Urusan/Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	produktivitas hutan rakyat	manajemen hutan rakyat	b. Masih rendahnya penerapan pengelolaan hutan rakyat lestari
		2. Masih rendahnya luas tutupan vegetasi hutan rakyat	a. Masih kurangnya bibit tanaman yang berkualitas b. Masih rendahnya penerapan teknologi dan inovasi pengelolaan hutan rakyat c. Belum optimalnya perlindungan hutan rakyat
		3. Masih rendahnya kapasitas kelompok masyarakat sekitar hutan	a. Masih rendahnya jumlah kelompok masyarakat sekitar hutan yang didampingi b. Masih kurangnya kapasitas pendamping kelompok
		4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat hutan social	a. Belum berkembangnya kelompok perhutanan sosial b. Masih kurangnya kapasitas pembina pendamping (penyuluh) c. Masih rendahnya peran pokja percepatan perhutanan sosial
		5. Masih rendahnya usaha produktif kelompok masyarakat sekitar hutan	a. Masih rendahnya produksi hasil hutan bukan kayu b. Belum tersedianya sarpras pengolahan hasil hutan bukan kayu c. Masih rendahnya pelatihan pengembangan hasil hutan bukan kayu

2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan yang tepat dan responsif, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah melakukan identifikasi terhadap berbagai isu yang berdampak signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Proses identifikasi ini memperhatikan sejumlah faktor, antara lain: hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, kondisi aktual lingkungan hidup dan kehutanan, serta arah kebijakan strategis baik di tingkat nasional maupun daerah. Sejumlah dokumen rujukan penting turut menjadi acuan dalam penetapan isu strategis, seperti RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2014–2019, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Berdasarkan analisis internal dan eksternal, serta pelingkupan isu-isu prioritas pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Jawa Tengah, ditetapkan enam isu strategis utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam periode perencanaan 2025–2029:

a. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
   Meningkatnya aktivitas industri, urbanisasi, dan kegiatan domestik yang tidak ramah lingkungan telah memperparah pencemaran udara, air, dan tanah di berbagai wilayah. Kerusakan lingkungan, baik akibat aktivitas manusia maupun bencana alam, menimbulkan degradasi kualitas lingkungan yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan produktivitas ekosistem. Diperlukan penguatan instrumen pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.
b. Meningkatnya Timbulan Sampah
   Pertumbuhan populasi dan konsumsi masyarakat telah menyebabkan lonjakan volume sampah, khususnya di kawasan perkotaan. Pengelolaan sampah yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan daur ulang, serta keterbatasan fasilitas pengolahan sampah menjadi tantangan utama dalam pengendalian limbah padat. Upaya penguatan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan menjadi krusial.
c. Alih Fungsi Hutan dan Degradasi Sumber Daya Hutan/Lahan
   Tekanan terhadap kawasan hutan akibat konversi lahan untuk permukiman, infrastruktur, maupun kegiatan ekonomi lainnya menyebabkan fragmentasi hutan dan menurunnya fungsi ekologisnya. Degradasi hutan juga berdampak pada penurunan kualitas tutupan lahan, erosi, serta berkurangnya cadangan karbon dan keanekaragaman hayati. Diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan, serta penguatan kelembagaan dalam pengendalian alih fungsi kawasan.
d. Kerusakan Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut
   Wilayah pesisir Jawa Tengah menghadapi tekanan dari abrasi, pencemaran, konversi lahan mangrove, dan eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan. Kondisi ini mengancam keberlanjutan ekonomi nelayan, mengganggu ekosistem pesisir, serta memperparah dampak perubahan iklim. Restorasi ekosistem pesisir, termasuk rehabilitasi mangrove dan penguatan tata kelola wilayah pesisir secara terpadu, menjadi prioritas yang mendesak.
e. Ancaman Penurunan Keanekaragaman Hayati
   Penurunan populasi spesies endemik, degradasi habitat alami, serta perburuan dan perdagangan ilegal flora-fauna menjadi isu penting yang harus direspons secara serius. Keanekaragaman hayati merupakan aset ekologi dan ekonomi yang memiliki nilai strategis jangka panjang. Penguatan konservasi in-situ dan ex-situ, pengembangan kawasan lindung, serta peningkatan kesadaran publik menjadi strategi utama dalam menjaga kekayaan biodiversitas Jawa Tengah.
f. Peningkatan Intensitas Bencana Hidrometeorologis dan Perubahan Iklim

Fenomena perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologis seperti banjir, kekeringan, longsor, serta gelombang panas. Kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim perlu ditanggapi dengan penguatan adaptasi berbasis ekosistem, pemetaan risiko, serta integrasi kebijakan mitigasi dalam perencanaan pembangunan. Perlu juga dikembangkan pendekatan transformatif dalam pengelolaan sumber daya alam yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Tabel 2.5
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan perangkat daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup (air dan udara) 2. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup 3. Pengelolaan hutan belum berkelanjutan 4. Pengelolaan hutan belum berkelanjutan 5. Masih rendahnya produktivitas hutan rakyat	1. Keberlanjutan Pembangunan dengan daya dukung Lingkungan dan SDA 2. Peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limba 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Air 4. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan 5. Mitigasi kerugian melalui Tanggap bencana	a. Perubahan iklim b. Kehilangan keanekaragaman hayati c. Pencemaran lingkungan d. Krisis Air e. Pengurangan hutan f. Pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan g. Pencemaran plastik	a. Perubahan Iklim b. Pencemaran lingkungan c. Krisis kehilangan keanekaragaman hayati	a. Perubahan Iklim b. Pencemaran lingkungan c. Krisis kehilangan keanekaragaman hayati	a. Pencemaran dan kerusakan lingkungan b. Meningkatnya timbulan sampah c. Alih fungsi hutan dan degradasi sumberdaya hutan/laha d. Kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut e. Ancaman penurunan keanekaragaman hayati f. Peningkatan intensitas kejadian bencana alam hidrometeorologis dan perubahan iklim

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2025-202. Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah Jawa Tengah sebagai provinsi Maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah.

Berdasarkan visi misi pembangunan daerah dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang kemudian akan dirumuskan lebih lanjut dalam strategi dan arah kebijakan. Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah Mewujudkan Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis
   Sasaran ini diwujudkan melalui meningkatkan birokrasi yang berintegritas dan kolaboratif, meningkatkan kondusifitas wilayah dan demokrasi substansial, serta memperkuat otonomi fiskal daerah.
2. Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan berbasis lingkungan
   Sasaran ini diwujudkan dengan memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sub sektor unggulan Jawa Tengah, meningkatkan kemandirian desa, meningkatkan upaya pengendalian inflasi, meningkatkan ketahanan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta pengurangan resiko bencana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap.
3. Terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter
   Sasaran ini diwujudkan melalui meningkatkan akses layanan pendidikan berkualitas, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kebugaran masyarakat dan daya saing olahraga, meningkatkan budaya literasi dan kegemaran membaca melalui penguatan tata kelola literasi, meningkatkan daya saing pemuda, memperkuat jati diri dan meningkatkan pemajuan kebudayaan, meningkatkan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial, meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, dan penguatan tata kelola dan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam proses pembangunan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang kedua dirumuskan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub-sektor kehutanan.”

Berikut adalah tujuh sasaran utama yang menjadi tolok ukur pencapaian tujuan DLHK Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2029:

a. Menurunnya Pencemaran Udara
   Mewujudkan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat melalui penguatan pengawasan emisi, peningkatan ruang terbuka hijau, serta inovasi pengendalian polusi di daerah perkotaan dan kawasan industri.
b. Menurunnya Pencemaran Air Permukaan
   Mengendalikan pencemaran air permukaan, memperkuat sistem pengawasan izin lingkungan, serta memperluas pemantauan kualitas air untuk menjamin keberlanjutan sumber air permukaan.
c. Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan
   Melalui program rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, serta pengendalian alih fungsi lahan, DLHK berkomitmen memperluas cakupan kawasan hijau guna memperkuat daya dukung lingkungan.
d. Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
   Meningkatkan konservasi flora dan fauna, baik melalui penguatan kawasan konservasi maupun pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.
e. Meningkatnya Kapasitas Produksi Hasil Hutan
   Mendorong produktivitas sub-sektor kehutanan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha kehutanan, pengembangan hasil hutan bukan kayu, dan diversifikasi produk ramah lingkungan.
f. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah
   Memastikan setiap kegiatan organisasi didesain dengan pendekatan manajemen risiko yang baik, sebagai bentuk akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
g. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
   Mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, melalui inovasi pelayanan, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas SDM.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan												
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	86,35	87,73	84,91	84,93	84,94	84,96	84,98	84,99	84,99
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,23	52,03	68,71	68,82	68,92	69,02	69,13	69,23	69,23
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	46,34	48,37	59,46	59,47	59,48	59,49	59,5	59,51	59,51
			Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kehutanan	%	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
		Menurunnya pencemaran udara											
			Kualitas udara pada konsentrasi SO2 dan NO2	Angka	0,32	0,32	0,3238	0,3234	0,323	0,3226	0,3222	0,3219	0,3219
		Menurunnya pencemaran air											

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		permukaan											
			Indeks Pencemaran air	Angka	3,39	3,35	3,35	3,34	3,34	3,33	3,33	3,32	3,32
		Meningkatnya kualitas lahan											
			Luas tutupan lahan	Ha	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.477	1.022.507	1.022.532	1.022.557	1.022.582	1.022.582
		Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati											
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	N/A	N/A	0,482	0,487	0,492	0,497	0,502	0,507	0,506
		Meningkatnya kapasitas produksi hasil hutan											
			Pertumbuhan produksi hasil hutan	%	N/A	N/A	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis												
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	0	70	70	70	70	70	70	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah											
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	86,13	89,25	85	85	85	85	85	85	85
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah											
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	1,92	2,65	3	3	3	3	3	3	3

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah kedua terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merumuskan strategi pembangunan daerah yang salah satunya adalah memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan berbasis gender. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memperkuat pengelolaan keanekaragaman hayati yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, strategi ini juga mencakup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk pengelolaan sampah dan pencegahan pencemaran air oleh industri maupun UMKM.

Sejalan dengan arah tersebut, dalam rangka mencapai tujuan "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub-sektor kehutanan", Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai acuan sekaligus pedoman dalam menentukan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahun. Dengan demikian, arah kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya mendukung tercapainya tujuan, sasaran, dan strategi perangkat daerah, tetapi juga menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program. Rincian arah kebijakan tersebut disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan	Menurunnya pencemaran air permukaan	1. Peningkatan regulasi terkait status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah	1. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen perencanaan lingkungan hidup 2. Sinkronisasi dokumen perencanaan lingkungan hidup
		2. Pengawasan dan penegakan terhadap pelaku usaha/kegiatan pencemar air	1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan limbah 2. Meningkatkan penanganan pengaduan lingkungan hidup
		3. Peningkatan Kinerja Pengendalian Pencemaran Air	1. Meningkatkan pembinaan terhadap kabupaten / kota dalam pengendalian pencemaran air 2. Meningkatkan pembinaan ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran air
		4. Peningkatan kinerja laboratorium lingkungan parameter kualitas air	1. Meningkatkan kapasitas laboratorium lingkungan parameter kualitas air 2. Meningkatkan cakupan dan layanan pemantauan kualitas air di Jawa Tengah
		5. Peningkatan kapasitas dan partisipasi stakeholder dalam pengelolaan air limbah	1. Mendorong partisipasi stakeholder dalam pengelolaan air limbah terpadu melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan 2. Meningkatkan pembinaan masyarakat dalam pengendalian pencemaran air

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		6. Peningkatan pengawasan, pengelolaan terpadu, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah B3	1. Meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 2. Meningkatkan Pembinaan pengelolaan limbah B3 kepada kab/kota termasuk Pengurangan dan Penghapusan Merkuri 3. Fasilitasi pemulihan lahan terkontaminasi B3 / limbah B3
	Menurunnya pencemaran udara	1. Pengawasan dan penegakan terhadap pelaku usaha/kegiatan pencemar udara	1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pengendalian pencemaran udara 2. Meningkatkan penanganan pengaduan lingkungan hidup
		2. Peningkatan Kinerja Pengendalian Pencemaran Udara	1. Meningkatkan pembinaan terhadap kabupaten / kota dalam pengendalian pencemaran udara 2. Meningkatkan pembinaan ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran udara
		3. Peningkatan kinerja laboratorium lingkungan parameter kualitas udara	1. Meningkatkan kapasitas laboratorium lingkungan parameter kualitas udara 2. Meningkatkan cakupan dan layanan pemantauan kualitas udara di Jawa Tengah
		4. Peningkatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca	1. Meningkatkan pendampingan dan fasilitasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan profil emisi dan aksi penurunan emisi GRK

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Pendampingan kepada kab/kota dalam penyusunan profil emisi dan aksi penurunan emisi GRK
		5. Peningkatan Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	1. Meningkatkan pengurangan sampah di hulu melalui perubahan perilaku masyarakat 2. Meningkatkan pengolahan sampah di hulu dan hilir dengan teknologi ramah lingkungan 3. Meningkatkan pembinaan kab/kota dalam tata kelola pengelolaan sampah 4. Operasionalisasi TPST Regional 5. Pemberdayaan pengelolaan sampah di tingkat tapak (desa) melalui program Desa Mandiri Sampah. 6. Meningkatkan kolaborasi dengan para pihak dalam pengelolaan sampah
	Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan	1. Peningkatan inisiatif dan upaya rehabilitasi hutan dan lahan termasuk pada ekosistem mangrove dan karst berbasis keterpaduan ekosistem DAS	1. Memperkuat perencanaan dan sistem informasi rehabilitasi hutan dan lahan termasuk pada ekosistem mangrove dan karst 2. Memperkuat sinergitas dan peran serta para pihak (masyarakat, dunia usaha, media, akademisi dll) dalam rehabilitasi hutan dan lahan 3. Memperkuat sinergitas dan kapasitas kelembagaan pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) 4. Memperkuat NSPK dalam RHL berbasis ekosistem DAS

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Meningkatkan apresiasi para pihak dalam penerapan praktik baik pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 6. Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan bibit, benih berkualitas tersertifikasi
		2. Peningkatan Inisiatif dan Upaya Perlindungan Hutan	1. Memperkuat sistem dan basis data perlindungan hutan 2. Memperkuat keterlibatan dan peran serta para pihak (masyarakat, dunia usaha, media, akademisi dll) dalam perlindungan hutan 3. Memperkuat kapasitas para pihak dalam perlindungan hutan termasuk fasilitasi sarpras 4. Meningkatkan Koordinasi Penanganan gangguan/keamanan hutan
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	1. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	1. Meningkatkan kinerja pengelolaan Kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) dan kawasan bernilai ekosistem penting (KBEP) 2. Meningkatkan peran para pihak dalam pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting 3. Meningkatkan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi
		2. Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1. Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Kehati 2. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dan perdesaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dan mengurangi ancaman kelestarian kehati 4. Meningkatkan kolaborasi dengan para pihak dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kehati 5. Meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati secara eksitu
	Meningkatnya kapasitas produksi hasil hutan	1. Penataan hutan dan pemanfaatan hasil hutan	1. Pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 2. Fasilitasi sertifikasi hasil hutan 3. Penyusunan roadmap hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu prioritas unggulan 4. Fasilitasi pemasaran hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 5. Pengembangan multi usaha kehutanan termasuk jasa lingkungan 6. Penataan hutan rakyat 7. Penguatan perencanaan kehutanan tingkat provinsi 8. Penguatan pendampingan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan, dan Kelola Usaha.
		2. Penguatan dukungan teknis dan pemasaran bagi kelompok tani hutan (KTH)	1. Meningkatkan pelatihan teknis dan bantuan sarpras pengembangan hasil hutan bukan kayu 2. Meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta dan UMKM kehutanan
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	1. Penerapan manajemen risiko dalam setiap program dan kegiatan	1. Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan penganggaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program DLHK	1. Penguatan sistem pengendalian internal perangkat daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	1. Digitalisasi layanan publik bidang lingkungan hidup dan kehutanan	1. Pengembangan layanan perizinan dan pengaduan berbasis aplikasi
		2. Penguatan budaya pelayanan prima di internal organisasi	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan sesuai kebutuhan pengembangan organisasi 2. Penyusunan standar pelayanan minimum (SPM) yang terukur dan terpublikasi

Tabel 3.3

Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Tema Pembangunan Daerah Jawa Tengah: Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional Dalam mendukung tema pembangunan tersebut program dan kegiatan di fokuskan pada: 1. Rehabilitasi lahan kritis melalui peningkatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, rehabilitasi mangrove termasuk juga program agroforestry 2. Penguatan pengelolaan sumberdaya air dan lingkungan melalui konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) 3. Pengendalian pencemaran lingkungan termasuk pengelolaan persampahan 4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Tema Pembangunan Daerah Jawa Tengah: Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Dalam mendukung tema pembangunan tersebut program dan kegiatan di fokuskan pada: 1. Pelestarian Kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati 2. Pengelolaan persampahan 3. Peningkatan kualitas air dan udara 4. Peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat 5. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), 6. Pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan 7. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Tema Pembangunan Daerah Jawa Tengah: Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau Dalam mendukung tema pembangunan tersebut program dan kegiatan di fokuskan pada: 1. Pemanfaatan hasil hutan secara lestari 2. Rehabilitasi hutan dan lahan baik secara vegetatif maupun sipil teknis 3. Pelestarian Kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati 4. Pengendalian pencemaran 5. Pengelolaan persampahan termasuk pembangunan dan operasionalisasi TPST Regional 6. Pendampingan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Tema Pembangunan Daerah Jawa Tengah: Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan Dalam mendukung tema pembangunan tersebut program dan kegiatan di fokuskan pada: 1. Pengendalian pencemaran dan pengelolaan persampahan 2. Peningkatan hutan rakyat dan pengembangan agroforestry 3. Pemanfaatan hasil hutan secara lestari 4. Pelestarian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati 5. Pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan.	Tema Pembangunan Daerah Jawa Tengah Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan Dalam mendukung tema pembangunan tersebut program dan kegiatan di fokuskan pada: 1. Rehabilitasi hutan dan lahan 2. Pengendalian pencemaran lingkungan 3. Pengelolaan persampahan 4. Pelestarian Kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati 5. Peningkatan ruang terbuka hijau 6. Pemanfaatan hasil hutan secara lestari 7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
5. Pelestarian Kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati 6. Pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan 7. Pendampingan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	8. Pendampingan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	7. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	6. Pendampingan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 7. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	8. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai mana disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan								
	Sasaran:								
	Menurunnya pencemaran air permukaan	Indeks Pencemaran Air	Pembuangan air limbah produksi ke badan air	16	Kurangnya perhatian pelaku usaha/kegiatan terhadap pengolahan limbah yang tepat	Kondisi kualitas sungai tidak sesuai baku mutu air	1. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian pencemaran air 2. Mengoordinasikan penanganan pengaduan dan pengawasan penataan lingkungan hidup tingkat Jawa Tengah	Kepala Dinas	2025-2029
	Sasaran: Menurunnya pencemaran udara	Indeks SO2 dan NO2	Pencemaran udara berasal dari aktivitas industri	16	Kurangnya perhatian pelaku usaha/kegiatan terhadap pengolahan emisi gas buang dalam	Gas buang yang dihasilkan dapat mempengaruhi iklim global, termasuk peningkatan suhu dan	1. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian pencemaran udara 2. Mengoordinasikan inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup	Kepala Dinas	2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					proses produksi	perubahan cuaca ekstrem	3. Mengoordinasikan percepatan pembentukkan program kampung iklim 4. Mengkoordinasikan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		
	Sasaran: Meningkatnya luasan tutupan lahan	Luas Tutupan Lahan	Gangguan keamanan hutan	16	Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam penanganan gangguan keamanan hutan	Kerusakan ekosistem hutan dan menurunnya keanekaragaman hayati	1. Mengkoordinasikan pengelolaan hutan berkelanjutan 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan hutan 4. Mengoordinasikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Kepala Dinas	2025-2029
	Sasaran: Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Konversi habitat alami spesies	16	Perubahan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya dan pemukiman	Kehilangan keanekaragaman hayati	1. Mendorong percepatan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati	Kepala Dinas	2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dan implementasinya 2. Mengkoordinasikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 3. Perlindungan kawasan konservasi, Kawasan Ekosistem Esensial dan Cagar Biosfer		
	Sasaran: Meningkatnya kapasitas produksi hasil hutan	Pertumbuhan produksi hasil hutan	Penebangan hutan secara berlebihan	16	Adanya Ketimpangan antara pasokan dan permintaan bahan baku kayu	Terhambatnya produktivitas dan nilai tambah hasil hutan	1. Mengkoordinasikan Pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 2. Mendorong pengembangan sistem sertifikasi legalitas hasil hutan 3. Penyediaan pelatihan teknis dan bantuan sarpras pengembangan hasil hutan bukan kayu	Kepala Dinas	2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Tujuan: Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis								
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Lambatnya pelayanan terhadap masyarakat	16	Keterbatasan kapasitas SDM tenaga teknis	Terjadi penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	1. Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas dan optimalisasi SDM yang ada saat ini	Kepala Dinas	2025-2029
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	adanya praktik Korupsi, kolusi, dan nepotisme	16	Belum optimalnya pengelolaan risiko di DLHK	Penurunan tingkat integritas	1. Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas dan optimalisasi SDM dalam pengelolaan risiko	Kepala Dinas	2025-2029

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menetapkan 13 (tiga belas) program prioritas yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kebijakan pembangunan sektor ini. Setiap program dirancang secara holistik, melibatkan lintas sektor dan multipihak, pengarusutamaan gender (PUG) serta diarahkan pada hasil yang nyata, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.

1) **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**
   Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) provinsi, Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi, serta fasilitasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.
2) **Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
   Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, pembangunan IPAL UMKM, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim.
3) **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**
   Program ini diarahkan pada Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati, fasilitasi penanganan ruang terbuka hijau (RTH) dengan jenis tanaman penyerap karbon dan tanaman langka, bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan kehati, pengelolaan kebun raya Baturraden.
4) **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**
   Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan pengelolaan limbah B3.
5) **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
   Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber

pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup/DELH, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

6) **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan termasuk juga penguatan program sekolah adiwiyata, peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat dan peningkatan kapasitas penyuluh lingkungan hidup.

7) **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada pengelolaan pengaduan lingkungan hidup yang masuk baik yang melalui laporgub, surat tertulis, media sosial dan lainnya (diteruskan kepada kementerian lingkungan hidup, pemerintah kab/kota atau dilakukan verifikasi lapangan sesuai dengan kewenangannya.

8) **Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana persampahan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional, rakor pengelolaan sampah, gerakan desa mandiri sampah, serta fasilitasi sarpras pengelolaan sampah kepada kelompok masyarakat.

9) **Program Pengelolaan Hutan**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan review/ penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi, penyusunan statistik kehutanan Jawa Tengah, penataan/registrasi hutan rakyat, pengolahan hasil hutan bukan kayu/HHBK dan jasa lingkungan; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan pengolahan hasil hutan dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun; penyusunan RTnRL, pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis melalui pembangunan/pengembangan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, rehabilitasi ekosistem mangrove, karst dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air; penanganan kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan; perlindungan dan pengamanan hutan dan perbenihan tanaman hutan.

10) **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Program ini diarahkan pada pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan DAS dalam satu kabupaten/kota melalui peningkatan peran, apresiasi, partisipasi dan kapasitas masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam pengelolaan DAS, gerakan rehabilitasi/ pemulihan kapasitas daya dukung DAS, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS serta pengembangan kelembagaan pengelola DAS.

11) **Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya

Mangkunegoro I, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam melalui perencanaan dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, pendampingan masyarakat penyangga kawasan konservasi; inisiasi kawasan konservasi baru melalui peningkatan/perubahan fungsi kawasan hutan; perlindungan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES melalui penanganan konflik satwa liar dan pengendalian pemanfaatan TSL, serta pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem mangrove, karst.

12) **Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**

Program ini diarahkan pada penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat berupa penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan usaha perhutanan sosial, serta penguatan pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS), monitoring dan evaluasi perhutanan sosial . Peningkatan kapasitas SDM kehutanan.

13) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program diarahkan pada kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Seluruh program dan kegiatan di atas akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dengan total indikasi pendanaan sebesar Rp1,324 triliun untuk periode 2025–2029. Pelaksanaan dilakukan oleh bidang teknis, sekretariat, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan perincian sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan (IKL) *												11.075.000.000		13.187.470.000		23.804.050.000		25.679.202.000		41.428.074.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
							Indeks Kualitas Lahan (IKL) *	Angka	48,37	59,46	59,47		59,48		59,49		59,5		59,51		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati **											2.980.000.000		3.912.000.000		5.313.000.000		6.175.000.000		7.420.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
							Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah **	Angka	0,468	0,482	0,487	2.980.000.000	0,492	3.912.000.000	0,497	5.313.000.000	0,502	6.175.000.000	0,507	7.420.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) ***									550.000.000		575.000.000		848.000.000		1.050.000.000		1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terkelolanya keanekaragaman hayati	Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden ***	%	2,6	2,6	3	550.000.000	3	575.000.000	3	848.000.000	3	1.050.000.000	3	1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		2.11.04.1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								550.000.000		575.000.000		848.000.000		1.050.000.000		1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				****																	Baturraden Kelas B	
						Terkelolanya koleksi tumbuhan di Kebun Raya Baturraden	Jumlah pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden ****	Unit	2	2	2	550.000.000	2	575.000.000	2	848.000.000	2	1.050.000.000	2	1.500.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		2.11.04.1.01.0003			Pengelolaan Kebun Raya *****							550.000.000		575.000.000		848.000.000		1.050.000.000		1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi *****	Ha	143,5	143,5	143,5	550.000.000	143,5	575.000.000	143,5	848.000.000	143,5	1.050.000.000	143,5	1.500.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B JAWA TENGAH
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) ***									820.000.000		1.110.000.000		1.420.000.000		1.850.000.000		2.100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani ***	%	2,02	0,4	2,02	820.000.000	2,02	1.110.000.000	2,02	1.420.000.000	2,02	1.850.000.000	2,02	2.100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.04.1.0		Pengelola																	Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1		an Keanekaragaman Hayati Provinsi ****								820.000.000		1.110.000.000		1.420.000.000		1.850.000.000		2.100.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Provinsi	Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani ****	Ha	50	10	50	820.000.000	50	1.110.000.000	50	1.420.000.000	50	1.850.000.000	50	2.100.000.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.04.1.01.0001			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati *****							130.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun *****	Dokumen	1	1	1	130.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.0004			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) *****							620.000.000		800.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi *****	Ha	50	10	50	620.000.000	50	800.000.000	50	1.100.000.000	50	1.200.000.000	50	1.350.000.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.0006			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati *****							70.000.000		60.000.000		70.000.000		350.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Meningkatnya jumlah orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati *****	Orang	60	60	60	70.000.000	60	60.000.000	60	70.000.000	60	350.000.000	60	400.000.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ***									50.000.000		105.000.000		105.000.000		125.000.000		135.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK I	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 1 ***	%	5	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi ****																		
						Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi di wilayah CDK I	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 1 ****	Jenis	2	2	2	25.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH
						Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif di wilayah CDK I	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 1 ***	%	100	100	100	25.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan								25.000.00		40.000.00		40.000.00		50.000.00		55.000.00	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ****								0		0		0		0		0	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terkelolanya Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di wilayah CDK I	Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 1 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi *****								25.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan *****	Orang	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	40.000.000	N/A	40.000.000	N/A	50.000.000	N/A	55.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ***									50.000.000		70.000.000		70.000.000		90.000.000		100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif di wilayah CDK II	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 2 ***	%	100	100	100	25.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah								25.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ****																		
						Terkelolanya Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di wilayah CDK II	Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 2 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi *****							25.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan *****	Orang	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	40.000.000	N/A	40.000.000	N/A	50.000.000	N/A	55.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH
						Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK II	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 2 ***	%	5	5	5	25.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangere								25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				d Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi ****																		
						Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) di wilayah CDK II	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 2 ****	Jenis	2	2	2	25.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****								25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK III	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 3 ***	%	5	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi ****																		
						Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) di wilayah CDK III	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 3 ****	Jenis	2	2	2	25.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH
						Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif wilayah CDK III	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 3 ***	%	100	100	100	25.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terkelolanya Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di wilayah CDK III	Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 3 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi *****						25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan *****	Orang	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ***									50.000.000		110.000.000		110.000.000		150.000.000		180.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK IV	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 4 ***	%	5	5	5	25.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa								25.000.000		45.000.000		45.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi ****																	CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) di wilayah CDK IV	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 4 ****	Jenis	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	45.000.000	N/A	45.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****								25.000.000		45.000.000		45.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH
						Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara	%	100	100	100	25.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						secara efektif di wilayah CDK IV	efektif CDK 4 ***														CDK WILAYAH IV	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terkelolanya Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di wilayah CDK IV	Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 4 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi *****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan *****	Orang	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	100.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK V	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 5 ***	%	5	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
		3.28.04.1.02		Perlindungan								25.000.00		65.000.00		65.000.00		75.000.00		80.000.00	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi ****								0		0		0		0		0	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) di wilayah CDK V	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 5 ****	Jenis	2	2	2	25.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH
						Terselenggaranya pengelolaan	Persentase kawasan bernilai	%	100	100	100	25.000.00	100	65.000.00	100	65.000.00	100	75.000.00	100	80.000.00	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif di wilayah CDK V	ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 5 ***					0		0		0		0		0		Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terkelolanya Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di wilayah CDK V	Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 5 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi *****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan *****	Orang	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK VI	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 6 ***	%	5	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) di wilayah CDK VI	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 6 ****	Jenis	2	2	2	25.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VI JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif di wilayah CDK VI	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 6 ***	%	100	100	100	25.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terkelolanya Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di wilayah CDK VI	Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 6 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi *****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan *****	Orang	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VI JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 8 ***	%	5	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						VIII															CDK WILAYAH VIII	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) di wilayah CDK VIII	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 8 ****	Jenis	2	2	2	25.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Masuk dalam Lampiran CITES	Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****															
						Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif di wilayah CDK VIII	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 8 ***	%	100	100	100	25.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terkelolanya Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di wilayah CDK VIII	Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 8 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi *****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan *****	Orang	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terselenggaranya	Persentase jenis	%	5	5	5		5		5		5		5		Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK IX	tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 9 ***					25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) di wilayah CDK IX	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 9 ****	Jenis	2	2	2	25.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVA	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****														SI SUMBER DAYA ALAM	
						Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif di wilayah CDK IX	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 9 ***	%	100	100	100	25.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terkelolanya Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di wilayah CDK IX	Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK 9 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi *****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan *****	Orang	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN									25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			EKOSISTEMNYA ***																		WILAYAH X	
						Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK X	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 10 ***	%	5	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) di wilayah CDK X	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 10 ****	Jenis	2	2	2	25.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Pengendalian dan	Jumlah Laporan Pengendalian dan	Laporan	N/A	N/A	N/A	25.000.00	N/A	65.000.00	N/A	65.000.00	N/A	75.000.00	N/A	80.000.00	SEKSI REHABILIT	CDK WILAYAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****					0		0		0		0		0		ASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	X JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ***									695.000.000		572.000.000		845.000.000		655.000.000		865.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terkelolanya Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan ***	Angka	73	73	73	695.000.000	75	572.000.000	75	845.000.000	75	655.000.000	75	865.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
		3.28.04.1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi ****								695.000.000		572.000.000		845.000.000		655.000.000		865.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya pengamanan kawasan di Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Jumlah pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura ****	Kali	12	12	12	200.000.000	12	175.000.000	12	180.000.000	12	185.000.000	12	220.000.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.04.1.01.0015			Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi *****							200.000.000		175.000.000		180.000.000		185.000.000		220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan *****	Ha	2549,3	2549,3	2549,3	200.000.000	2549,3	175.000.000	2549,3	180.000.000	2549,3	185.000.000	2549,3	220.000.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A JAWA TENGAH
						Terlaksananya	Jumlah	Dokumen	2	2	2		2		2		2		2		Pokja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						pemanfaatan jasa lingkungan di Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Pemanfaatan Jasa lingkungan ****					220.000.000		200.000.000		460.000.000		250.000.000		375.000.000	Pemanfaatan	
		3.28.04.1.01.0006			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi *****							40.000.000		25.000.000		100.000.000		35.000.000		65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti *****	Permohonan	N/A	N/A	2	40.000.000	2	25.000.000	2	100.000.000	2	35.000.000	2	65.000.000	Pokja Pemanfaatan	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A JAWA TENGAH
		3.28.04.1.01.0007			Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi *****							30.000.000		20.000.000		100.000.000		30.000.000		60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara Tahura Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi *****	Dokumen	2	2	2	30.000.000	2	20.000.000	2	100.000.000	2	30.000.000	2	60.000.000	Pokja Pemanfaatan	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A JAWA TENGAH
		3.28.04.1.01.0008			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi *****							30.000.000		25.000.000		120.000.000		35.000.000		65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif *****	Desa	2	2	2	30.000.000	2	25.000.000	2	120.000.000	2	35.000.000	2	65.000.000	Pokja Pemanfaatan	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A JAWA TENGAH
		3.28.04.1.01.0011			Perencanaan Pengelolaan TAHURA *****							120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		185.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan *****	Dokumen	1	1	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	185.000.000	Pokja Pemanfaatan	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A JAWA TENGAH
						Terkelolanya kawasan yang bernilai kehati tinggi di Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Jumlah luas kawasan yang bernilai kehati tinggi ****	Ha	N/A	20	20	275.000.000	20	197.000.000	20	205.000.000	20	220.000.000	20	270.000.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.04.1.01.0013			Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi *****							100.000.000		90.000.000		95.000.000		100.000.000		135.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi *****	Ha	20	20	20	100.000.000	20	90.000.000	20	95.000.000	20	100.000.000	20	135.000.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A JAWA TENGAH
		3.28.04.1.01.0014			Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi *****							175.000.000		107.000.000		110.000.000		120.000.000		135.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem *****	Ha	20	20	20	175.000.000	20	107.000.000	20	110.000.000	20	120.000.000	20	135.000.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN									120.000.000		125.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			EKOSISTEMNYA ***																		Raya Baturraden Kelas B	
						Terselenggaranya konservasi sumberdaya alam hayati dan eksosistemnya	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden ***	%	100	100	100	120.000.000	100	125.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi ****								120.000.000		125.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terlaksananya perlindungan tumbuhan di Kebun Raya Baturraden	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di Kebun Raya Baturraden ****	Jenis	554	554	554	120.000.000	554	125.000.000	554	300.000.000	554	400.000.000	554	500.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****							120.000.000		125.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau	Laporan	1	1	1	120.000.000	1	125.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Masuk dalam Lampiran CITES	Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****															
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ***									25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK XI	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 11 ***	%	5	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) di wilayah CDK XI	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK 11 ****	Jenis	2	2	2	25.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan							25.000.00		65.000.00		65.000.00		75.000.00		80.000.00	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****							0		0		0		0		0		Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH XI JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ***									25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK VII	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 7 ***	%	5	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Perlindungan	Jumlah jenis Tumbuhan dan	Jenis	2	2	2	25.000.00	2	65.000.00	2	65.000.00	2	75.000.00	2	80.000.00	SEKSI REHABILIT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) di wilayah CDK VII	Satwa Liar yang ditangani CDK 7 ****					0		0		0		0		0	ASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VII JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ***									320.000.000		400.000.000		770.000.000		880.000.000		1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani ***	%	5	5	5	50.000.000	5	100.000.000	5	270.000.000	5	280.000.000	5	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Daya Alam	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi ****								50.000.000		100.000.000		270.000.000		280.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Terlaksananya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani ****	Jenis	2	2	2	50.000.000	2	100.000.000	2	270.000.000	2	280.000.000	2	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****							50.000.000		100.000.000		270.000.000		280.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	270.000.000	1	280.000.000	1	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES *****													Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif ***	%	100	100	100	270.000.000	100	300.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ****								270.000.000		300.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Terkelolanya Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Pengendalian pengelolaan KBEP ****	Dokumen	7	7	7	270.000.000	7	300.000.000	7	500.000.000	7	600.000.000	7	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai							270.000.000		300.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi *****																Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan *****	Orang	200	200	200	270.000.000	200	300.000.000	200	500.000.000	200	600.000.000	200	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas lahan **											8.095.000.000		9.275.470.000		18.491.050.000		19.504.202.000		34.008.074.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
							Luas tutupan lahan **	Ha	1022457	1022457	1022457	8.095.000.000	1022457	9.275.470.000	1022457	18.491.050.000	1022457	19.504.202.000	1022457	34.008.074.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									715.000.000		787.770.000		1.841.250.000		1.865.250.000		2.835.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK I	Persentase lahan kritis tertangani CDK 1 ***	%	0,04	0,01	0,05	685.000.000	0,05	722.770.000	0,05	1.776.250.000	0,06	1.790.250.000	0,06	2.755.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara ****								685.000.000		722.770.000		1.776.250.000		1.790.250.000		2.755.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan di wilayah CDK I	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 1 ****	Ha	166	43	195	685.000.000	204	722.770.000	214	1.776.250.000	224	1.790.250.000	234	2.755.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara *****							350.000.000		376.385.000		500.000.000		514.000.000		600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	30	25	90	350.000.000	94	376.385.000	99	500.000.000	103	514.000.000	108	600.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara *****							200.000.000		241.385.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	136	18	100	200.000.000	105	241.385.000	110	400.000.000	115	400.000.000	120	500.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****							30.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****	Laporan	1	1	1	30.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan *****							40.000.000		65.000.000		200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi *****	Ha	N/A	N/A	5	40.000.000	5,25	65.000.000	5,5	200.000.000	5,75	200.000.000	6	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan,

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan *****							65.000.000		0		200.000.000		200.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	30	65.000.000	30	0	30	200.000.000	30	200.000.000	30	300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug *****							0		0		200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun *****	Unit	N/A	N/A	10	0	10	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan *****							0		0		231.250.000		231.250.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	3	0	3	0	3	231.250.000	3	231.250.000	3	500.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH
						Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK I	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 1 ***	%	100	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan								30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Lindung dan Hutan Produksi ****																	WILAYAH I	
						Terlaksananya Perlindungan Hutan di wilayah CDK I	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 1 ****	Kelompok	2	2	2	30.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****							30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									585.000.000		672.770.000		1.344.020.000		1.368.020.000		3.725.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK II	Persentase lahan kritis tertangani CDK 2 ***	%	0,15	0,01	0,06	555.000.000	0,06	607.770.000	0,06	1.279.020.000	0,07	1.293.020.000	0,07	3.645.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara ****								555.000.000		607.770.000		1.279.020.000		1.293.020.000		3.645.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan di wilayah CDK II	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 2 ****	Ha	595	56	225	555.000.000	236	607.770.000	247	1.279.020.000	258	1.293.020.000	270	3.645.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara *****							300.000.000		341.385.000		341.385.000		355.385.000		1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					CDK WILAYAH II	
						Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	158	30	120	300.000.000	126	341.385.000	132	341.385.000	138	355.385.000	144	1.000.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara *****							140.000.000		166.385.000		166.385.000		166.385.000		700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	406	26	95	140.000.000	99	166.385.000	104	166.385.000	109	166.385.000	114	700.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****							0		40.000.000		40.000.000		40.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****	Laporan	1	1	1	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	120.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan *****							50.000.000		60.000.000		100.000.000		100.000.000		625.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi *****	Ha	31	N/A	10	50.000.000	10,5	60.000.000	11	100.000.000	11,5	100.000.000	12	625.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan *****							65.000.000		0		200.000.000		200.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	30	65.000.000	30	0	30	200.000.000	30	200.000.000	30	300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVA	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Sumur Resapan															SI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug *****							0		0		200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun *****	Unit	N/A	N/A	10	0	10	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan *****							0		0		231.250.000		231.250.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	3	0	3	0	3	231.250.000	3	231.250.000	3	500.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH
						Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK II	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 2 ***	%	100	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ****								30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Perlindungan Hutan di wilayah CDK II	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 2 ****	Kelompok	2	2	2	30.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****							30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									665.000.000		857.770.000		1.424.020.000		1.448.020.000		3.430.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK III	Persentase lahan kritis tertangani CDK 3 ***	%	0,12	0,01	0,09	635.000.000	0,09	792.770.000	0,1	1.359.020.000	0,1	1.373.020.000	0,11	3.350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara ****								635.000.000		792.770.000		1.359.020.000		1.373.020.000		3.350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan di wilayah CDK III	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 3 ****	Ha	485	52	347	635.000.000	364	792.770.000	381	1.359.020.000	399	1.373.020.000	416	3.350.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara *****							350.000.000		391.385.000		391.385.000		405.385.000		1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	153	32	250	350.000.000	262	391.385.000	275	391.385.000	287	405.385.000	300	1.000.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara *****							190.000.000		216.385.000		216.385.000		216.385.000		1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	320	20	95	190.000.000	99	216.385.000	104	216.385.000	109	216.385.000	114	1.000.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVA	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Negara															SI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****							0		40.000.000		40.000.000		40.000.000		55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****	Laporan	1	1	1	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	55.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan *****							30.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		95.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi *****	Ha	12	N/A	2	30.000.000	2,1	80.000.000	2,2	80.000.000	2,3	80.000.000	2,4	95.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan *****							65.000.000		65.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	30	65.000.000	30	65.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug *****							0		0		200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun *****	Unit	N/A	N/A	10	0	10	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan *****							0		0		231.250.000		231.250.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	3	0	3	0	3	231.250.000	3	231.250.000	3	500.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH
						Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK III	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 3 ***	%	100	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ****								30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Perlindungan Hutan di wilayah CDK III	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 3 ****	Kelompok	2	2	2	30.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****							30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									645.000.000		687.770.000		1.334.020.000		1.353.020.000		2.445.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK IV	Persentase lahan kritis tertangani CDK 4 ***	%	0,02	0,02	0,05	615.000.000	0,05	617.770.000	0,06	1.264.020.000	0,06	1.278.020.000	0,06	2.365.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					CDK WILAYAH IV	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara ****								615.000.000		617.770.000		1.264.020.000		1.278.020.000		2.365.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan di wilayah CDK IV	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 4 ****	Ha	70	83	205	615.000.000	215	617.770.000	225	1.264.020.000	235	1.278.020.000	246	2.365.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara *****							310.000.000		332.770.000		332.770.000		346.770.000		425.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	32	60	100	310.000.000	105	332.770.000	110	332.770.000	115	346.770.000	120	425.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara *****							190.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	34	23	90	190.000.000	94	160.000.000	99	160.000.000	103	160.000.000	108	190.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****							0		40.000.000		40.000.000		40.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan	Laporan	1	1	1	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Rehabilitasi Lahan	Rehabilitasi Lahan *****														DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan *****							50.000.000		85.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi *****	Ha	4	N/A	15	50.000.000	15	85.000.000	16	100.000.000	17	100.000.000	18	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan *****							65.000.000		0		200.000.000		200.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	30	65.000.000	30	0	30	200.000.000	30	200.000.000	30	300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug *****							0		0		200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun *****	Unit	N/A	N/A	10	0	10	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan *****							0		0		231.250.000		231.250.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	3	0	3	0	3	231.250.000	3	231.250.000	3	500.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK IV	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 4 ***	%	100	100	100	30.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ****								30.000.000		70.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Perlindungan Hutan di wilayah CDK IV	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 4 ****	Kelompok	2	2	2	30.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****							30.000.000		70.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									655.000.000		642.770.000		1.314.020.000		1.338.020.000		2.445.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK V	Persentase lahan kritis tertangani CDK 5 ***	%	0,01	0,02	0,08	625.000.000	0,08	577.770.000	0,09	1.249.020.000	0,09	1.263.020.000	0,09	2.365.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								625.000.000		577.770.000		1.249.020.000		1.263.020.000		2.365.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				****																		
						Terlaksananya Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan di wilayah CDK V	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 5 ****	Ha	22	60	310	625.000.000	325	577.770.000	341	1.249.020.000	356	1.263.020.000	372	2.365.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		314.000.000		425.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	10	40	190	300.000.000	199	300.000.000	209	300.000.000	218	314.000.000	228	425.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara *****							170.000.000		157.770.000		157.770.000		157.770.000		190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	11	20	100	170.000.000	105	157.770.000	110	157.770.000	115	157.770.000	120	190.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****							0		60.000.000		60.000.000		60.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****	Laporan	1	1	1	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan *****							90.000.000		60.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi *****	Ha	1	N/A	20	90.000.000	21	60.000.000	22	100.000.000	23	100.000.000	24	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan *****							65.000.000		0		200.000.000		200.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	30	65.000.000	30	0	30	200.000.000	30	200.000.000	30	300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug *****							0		0		200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun *****	Unit	N/A	N/A	10	0	10	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan *****							0		0		231.250.000		231.250.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	3	0	3	0	3	231.250.000	3	231.250.000	3	500.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH
						Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK V	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 5 ***	%	100	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ****								30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Perlindungan Hutan	Jumlah Masyarakat Peduli Api /	Kelompok	2	2	2	30.000.00	2	65.000.00	2	65.000.00	2	75.000.00	2	80.000.00	SEKSI PENYULUH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						di wilayah CDK V	Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 5 ****					0		0		0		0		0	AN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****							30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									625.000.000		632.770.000		1.304.020.000		1.333.020.000		2.435.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VI	Persentase lahan kritis tertangani CDK 6 ***	%	0,18	0,03	0,11	595.000.000	0,11	582.770.000	0,12	1.254.020.000	0,13	1.268.020.000	0,13	2.365.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara ****								595.000.000		582.770.000		1.254.020.000		1.268.020.000		2.365.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan di wilayah CDK VI	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 6 ****	Ha	697	124	426	595.000.000	447	582.770.000	468	1.254.020.000	489	1.268.020.000	511	2.365.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara *****							320.000.000		300.000.000		300.000.000		314.000.000		425.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terbangunnya Hutan Rakyat di	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di	Ha	45	70	240	320.000.0	252	300.000.0	264	300.000.0	276	314.000.0	288	425.000.0	SEKSI REHABILIT	CDK WILAYAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Luar Kawasan Hutan Negara	Luar Kawasan Hutan Negara *****					00		00		00		00		00	ASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	VI JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara *****							160.000.000		162.770.000		162.770.000		162.770.000		190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	651	54	171	160.000.000	179	162.770.000	188	162.770.000	196	162.770.000	205	190.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VI JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****							0		60.000.000		60.000.000		60.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****	Laporan	1	1	1	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VI JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan *****							50.000.000		60.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi *****	Ha	1	N/A	15	50.000.000	15	60.000.000	16	100.000.000	17	100.000.000	18	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VI JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan *****							65.000.000		0		200.000.000		200.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	30	65.000.000	30	0	30	200.000.000	30	200.000.000	30	300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVA	CDK WILAYAH VI JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Sumur Resapan															SI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug *****							0		0		200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun *****	Unit	N/A	N/A	10	0	10	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VI JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan *****							0		0		231.250.000		231.250.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	3	0	3	0	3	231.250.000	3	231.250.000	3	500.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VI JAWA TENGAH
						Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK VI	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 6 ***	%	100	100	100	30.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ****								30.000.000		50.000.000		50.000.000		65.000.000		70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Perlindungan Hutan di wilayah CDK VI	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 6 ****	Kelompok	2	2	2	30.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan							30.000.000		50.000.000		50.000.000		65.000.000		70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Perlindungan Hutan *****																Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VI JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									595.000.000		677.770.000		1.349.020.000		1.373.020.000		2.445.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VIII	Persentase lahan kritis tertangani CDK 8 ***	%	0,04	0,02	0,05	565.000.000	0,06	612.770.000	0,06	1.284.020.000	0,06	1.298.020.000	0,06	2.365.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara ****								565.000.000		612.770.000		1.284.020.000		1.298.020.000		2.365.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan di wilayah CDK VIII	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 8 ****	Ha	153	94	206	565.000.000	216	612.770.000	226	1.284.020.000	236	1.298.020.000	247	2.365.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara *****							300.000.000		342.770.000		342.770.000		356.770.000		425.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	133	75	107	300.000.000	112	342.770.000	117	342.770.000	123	356.770.000	128	425.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Kawasan Hutan Negara *****																Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	18	19	90	150.000.000	94	150.000.000	99	150.000.000	103	150.000.000	108	190.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****							0		60.000.000		60.000.000		60.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****	Laporan	1	1	1	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan *****							50.000.000		60.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi *****	Ha	2	N/A	9	50.000.000	9	60.000.000	9	100.000.000	10	100.000.000	10	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan *****							65.000.000		0		200.000.000		200.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	30	65.000.000	30	0	30	200.000.000	30	200.000.000	30	300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug *****							0		0		200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					WILAYAH VIII	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun *****	Unit	N/A	N/A	10	0	10	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan *****							0		0		231.250.000		231.250.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	3	0	3	0	3	231.250.000	3	231.250.000	3	500.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH
						Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK VIII	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 8 ***	%	100	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ****								30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Perlindungan Hutan di wilayah CDK VIII	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 8 ****	Kelompok	2	2	2	30.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****							30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAA	CDK WILAYAH VIII JAWA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Perlindungan Hutan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****														TAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									525.000.000		647.770.000		1.319.020.000		1.343.020.000		2.045.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK IX	Persentase lahan kritis tertangani CDK 9 ***	%	0,04	0,03	0,09	495.000.000	0,09	582.770.000	0,1	1.254.020.000	0,1	1.268.020.000	0,1	1.965.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara ****								495.000.000		582.770.000		1.254.020.000		1.268.020.000		1.965.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan di wilayah CDK IX	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 9 ****	Ha	166	110	341	495.000.000	358	582.770.000	375	1.254.020.000	392	1.268.020.000	409	1.965.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara *****							300.000.000		382.770.000		382.770.000		396.770.000		425.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	49	60	241	300.000.000	253	382.770.000	265	382.770.000	277	396.770.000	289	425.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara *****							130.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	117	50	100	130.000.000	105	140.000.000	110	140.000.000	115	140.000.000	120	190.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVA	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Negara															SI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****							0		60.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****	Laporan	1	1	1	0	1	60.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan *****							65.000.000		0		200.000.000		200.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	30	65.000.000	30	0	30	200.000.000	30	200.000.000	30	300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug *****							0		0		200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun *****	Unit	N/A	N/A	10	0	10	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan *****							0		0		231.250.000		231.250.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	3	0	3	0	3	231.250.000	3	231.250.000	3	500.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					ALAM	
						Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK IX	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 9 ***	%	100	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ****								30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Perlindungan Hutan di wilayah CDK IX	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 9 ****	Kelompok	2	2	2	30.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****							30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									545.000.000		597.770.000		1.229.020.000		1.253.020.000		2.045.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK X	Persentase lahan kritis tertangani CDK 10 ***	%	0,02	0,01	0,07	515.000.000	0,08	532.770.000	0,08	1.164.020.000	0,09	1.178.020.000	0,09	1.965.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan								515.000.000		532.770.000		1.164.020.000		1.178.020.000		1.965.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Negara ****																		
						Terlaksananya Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan di wilayah CDK X	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 10 ****	Ha	86	29	290	515.000.000	304	532.770.000	319	1.164.020.000	333	1.178.020.000	348	1.965.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara *****							280.000.000		261.385.000		261.385.000		275.385.000		425.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	35	13	140	280.000.000	147	261.385.000	154	261.385.000	161	275.385.000	168	425.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH X JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara *****							170.000.000		171.385.000		171.385.000		171.385.000		190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	51	16	150	170.000.000	157	171.385.000	165	171.385.000	172	171.385.000	180	190.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH X JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****							0		0		100.000.000		100.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	100.000.000	N/A	100.000.000	N/A	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH X JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan *****							65.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	30	65.000.000	30	100.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVA	CDK WILAYAH X JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Sumur Resapan															SI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug *****							0		0		200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun *****	Unit	N/A	N/A	10	0	10	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH X JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan *****							0		0		231.250.000		231.250.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	3	0	3	0	3	231.250.000	3	231.250.000	3	500.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH X JAWA TENGAH
						Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK X	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 10 ***	%	100	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ****								30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Perlindungan Hutan di wilayah CDK X	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 10 ****	Kelompok	2	2	2	30.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****							30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	30.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH X JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									810.000.000		890.000.000		1.599.600.000		1.988.752.000		3.266.074.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Meningkatnya bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi ***	%	100	100	100	810.000.000	100	890.000.000	100	1.599.600.000	100	1.988.752.000	100	3.266.074.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
		3.28.03.1.09		Perbenihan Tanaman Hutan ****								810.000.000		890.000.000		1.599.600.000		1.988.752.000		3.266.074.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terlaksananya sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH ****	Sertifikat	75	75	75	90.000.000	75	140.000.000	75	599.600.000	75	728.752.000	75	1.060.000.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	
		3.28.03.1.09.0002			Sertifikasi Sumber Benih *****							10.000.000		20.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					A	
						Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan *****	Sertifikat	5	5	5	10.000.000	5	20.000.000	5	100.000.000	5	120.000.000	5	150.000.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0003			Sertifikasi Mutu Benih *****							10.000.000		20.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan *****	Sertifikat	10	10	10	10.000.000	10	20.000.000	10	100.000.000	10	120.000.000	10	150.000.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0004			Sertifikasi Mutu Bibit *****							10.000.000		20.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan *****	Sertifikat	60	60	60	10.000.000	60	20.000.000	60	100.000.000	60	120.000.000	60	150.000.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0005			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit *****							50.000.000		60.000.000		249.600.000		298.752.000		520.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Tanaman Hutan Kelas A	
						Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar *****	Laporan	2	2	2	50.000.000	2	60.000.000	2	249.600.000	2	298.752.000	2	520.000.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0010			Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan *****							10.000.000		20.000.000		50.000.000		70.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terlaksananya pelayanan perijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran bibit serta kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi *****	Unit Usaha	12	12	12	10.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	12	70.000.000	12	90.000.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A JAWA TENGAH
						Tersedianya bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi ****	Batang	600000	100000	200000	720.000.000	800000	750.000.000	800000	1.000.000.000	800000	1.260.000.000	800000	2.206.074.000	Pokja Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Benih	
		3.28.03.1.09.0006			Pembangunan Sumber Benih *****							95.000.000		100.000.000		200.000.000		460.000.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terlaksananya	Luas Sumber Benih	Ha	0,5	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		Pokja	Balai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Pembangunan Sumber Benih	yang Dibangun *****					95.000.000		100.000.000		200.000.000		460.000.000		500.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Benih	Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0007			Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan *****							625.000.000		650.000.000		800.000.000		800.000.000		1.706.074.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan *****	Batang	600000	100000	200000	625.000.000	80000	650.000.000	80000	800.000.000	80000	800.000.000	80000	1.706.074.000	Pokja Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Benih	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									565.000.000		647.770.000		1.279.020.000		1.303.020.000		2.045.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK XI	Persentase lahan kritis tertangani CDK 11 ***	%	0,11	0,02	0,05	535.000.000	0,05	582.770.000	0,06	1.214.020.000	0,06	1.228.020.000	0,06	1.965.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara ****								535.000.000		582.770.000		1.214.020.000		1.228.020.000		1.965.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan di wilayah CDK XI	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 11 ****	Ha	419	65	202	535.000.000	212	582.770.000	222	1.214.020.000	232	1.228.020.000	242	1.965.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.0			Pembangunan																Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		4.0002			Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara *****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		314.000.000		425.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	34	42	82	300.000.000	86	300.000.000	90	300.000.000	94	314.000.000	98	425.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH XI JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara *****							170.000.000		182.770.000		182.770.000		182.770.000		190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	385	23	120	170.000.000	126	182.770.000	132	182.770.000	138	182.770.000	144	190.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH XI JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****							0		0		100.000.000		100.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	100.000.000	N/A	100.000.000	N/A	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH XI JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan *****							65.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	30	65.000.000	30	100.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH XI JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug *****							0		0		200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun *****	Unit	N/A	N/A	10	0	10	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH XI JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan *****							0		0		231.250.000		231.250.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	3	0	3	0	3	231.250.000	3	231.250.000	3	500.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH XI JAWA TENGAH
						Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK XI	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 11 ***	%	100	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ****								30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Perlindungan Hutan di wilayah CDK XI	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 11 ****	Kelompok	2	2	2	30.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****							30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Koordinasi,	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat	Dokumen	N/A	N/A	N/A	30.000.00	N/A	65.000.00	N/A	65.000.00	N/A	75.000.00	N/A	80.000.00	SEKSI PENYULUH	CDK WILAYAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****					0		0		0		0		0		AN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	XI JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									515.000.000		582.770.000		1.254.020.000		1.278.020.000		2.045.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VII	Persentase lahan kritis tertangani CDK 7 ***	%	0,11	0,03	0,08	485.000.000	0,08	517.770.000	0,08	1.189.020.000	0,09	1.203.020.000	0,09	1.965.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara ****								485.000.000		517.770.000		1.189.020.000		1.203.020.000		1.965.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan di wilayah CDK VII	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 7 ****	Ha	416	136	294	485.000.000	308	517.770.000	323	1.189.020.000	338	1.203.020.000	352	1.965.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara *****							280.000.000		300.000.000		300.000.000		314.000.000		425.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara *****	Ha	201	95	204	280.000.000	214	300.000.000	224	300.000.000	234	314.000.000	244	425.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VII JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara *****							140.000.000		157.770.000		157.770.000		157.770.000		190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Penghijauan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar	Ha	215	41	90	140.000.0	94	157.770.0	99	157.770.0	103	157.770.0	108	190.000.0	SEKSI REHABILIT	CDK WILAYAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kawasan Hutan Negara *****					00		00		00		00		00		ASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	VII JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****							0		60.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****	Laporan	1	1	1	0	1	60.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VII JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0010			Pembangunan Sumur resapan *****							65.000.000		0		200.000.000		200.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	30	65.000.000	30	0	30	200.000.000	30	200.000.000	30	300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VII JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0012			Pembangunan gully plug *****							0		0		200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun *****	Unit	N/A	N/A	10	0	10	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	CDK WILAYAH VII JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0013			Pembangunan Dam Penahan *****							0		0		231.250.000		231.250.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam	Jumlah Dam Penahan yang terbangun *****	Unit	N/A	N/A	3	0	3	0	3	231.250.000	3	231.250.000	3	500.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVA	CDK WILAYAH VII JAWA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Penahan															SI SUMBER DAYA ALAM	TENGAH
						Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK VII	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 7 ***	%	100	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ****								30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Perlindungan Hutan di wilayah CDK VII	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 7 ****	Kelompok	2	2	2	30.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****							30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VII JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									120.000.000		130.000.000		230.000.000		260.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Meningkatnya penanganan lahan	Persentase lahan kritis tertangani ***	%	0,84	0,22	0,78	120.000.0	0,82	130.000.0	0,85	230.000.0	0,89	260.000.0	0,93	300.000.0	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						kritis						00		00		00		00		00	Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara ****								120.000.000		130.000.000		230.000.000		260.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Terlaksananya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) ****	Ha	3275	852	3041	120.000.000	3193	130.000.000	3345	230.000.000	3497	260.000.000	3649	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) *****							40.000.000		50.000.000		70.000.000		80.000.000		100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun	Dokumen	1	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							(RTnRL) *****														Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****							80.000.000		80.000.000		160.000.000		180.000.000		200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan *****	Laporan	1	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	160.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									160.000.000		200.000.000		550.000.000		650.000.000		750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
						Meningkatnya perlindungan hutan	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani ***	%	100	100	100	160.000.000	100	200.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	100	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ****								160.000.000		200.000.000		550.000.000		650.000.000		750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
						Terlaksananya Perlindungan Hutan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan ****	Dokumen	1	1	1	160.000.000	1	200.000.000	1	550.000.000	1	650.000.000	1	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****							160.000.000		200.000.000		550.000.000		650.000.000		750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan *****	Dokumen	1	1	1	160.000.000	1	200.000.000	1	550.000.000	1	650.000.000	1	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	JAWA TENGAH
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) ***									370.000.000		620.000.000		1.120.000.000		1.350.000.000		1.752.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Terkelolanya Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani ***	%	10	10	10	370.000.000	10	620.000.000	10	1.120.000.000	10	1.350.000.000	10	1.752.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.06.1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****								370.000.000		620.000.000		1.120.000.000		1.350.000.000		1.752.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Terlaksananya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya ****	Unit	5	5	5	370.000.000	5	620.000.000	5	1.120.000.000	5	1.350.000.000	5	1.752.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.06.1.01.0004			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS *****							200.000.000		270.000.000		500.000.000		600.000.000		750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan	Orang	500	200	500	200.000.000	500	270.000.000	500	500.000.000	500	600.000.000	500	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Kegiatan Pengelolaan DAS	Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS *****														Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.06.1.01.0005			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS *****							50.000.000		70.000.000		150.000.000		200.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS *****	Lembaga	8	10	12	50.000.000	12	70.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.0007			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah *****							40.000.000		80.000.000		120.000.000		150.000.000		252.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan *****	Dokumen	1	N/A	1	40.000.000	1	80.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	252.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.06.1.01.0008			Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS *****							80.000.000		200.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	
						Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS *****	Dokumen	8	10	12	80.000.000	12	200.000.000	12	350.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan (PE) *												3.690.000.000		6.775.000.000		7.946.000.000		10.195.000.000		13.216.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
							Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kehutanan *	%	0,47	0,47	0,47		0,47		0,47		0,47		0,47		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkat																				Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	nya kapasitas produksi hasil hutan **											3.690.000.000		6.775.000.000		7.946.000.000		10.195.000.000		13.216.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
							Pertumbuhan produksi hasil hutan **	%	0,47	0,47	0,47	3.690.000.000	0,47	6.775.000.000	0,47	7.946.000.000	0,47	10.195.000.000	0,47	13.216.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK I	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan ***	%	1,38	1,81	2,24	50.000.000	2,67	130.000.000	3,1	130.000.000	3,53	150.000.000	3,96	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di wilayah CDK I	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 1 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan *****	Unit Management	5	N/A	2	25.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <2.000 m3/Tahun di wilayah CDK I	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 1 ****	Unit	3	3	3	25.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK II	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 2 ***	%	1,29	1,72	2,15	50.000.000	2,58	130.000.000	3,01	130.000.000	3,45	150.000.000	3,88	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Kayu (HHBK) ****																		
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di wilayah CDK II	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 2 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan *****	Unit Management	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <2.000 m3/Tahun di wilayah CDK II	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 2 ****	Unit	3	3	3	25.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					kewenangan provinsi *****																	
						Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK III	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 3 ***	%	1,38	1,89	2,41	50.000.000	2,93	130.000.000	3,45	130.000.000	3,96	150.000.000	4,48	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di wilayah CDK III	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 3 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan	Unit Management	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	peraturan perundang-undangan *****														PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <2.000 m3/Tahun di wilayah CDK III	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 3 ****	Unit	3	3	3	25.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK IV	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 4 ***	%	1,21	1,55	1,89	50.000.000	2,24	130.000.000	2,58	130.000.000	2,96	150.000.000	3,27	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan								25.000.00		65.000.00		65.000.00		75.000.00		80.000.00	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ****								0		0		0		0		0	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di wilayah CDK IV	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 4 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan *****	Unit Management	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <2.000 m3/Tahun di wilayah CDK IV	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 4 ****	Unit	3	3	3	25.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****																Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK V	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 5 ***	%	1,29	1,64	1,98	50.000.000	2,33	130.000.000	2,67	130.000.000	3,01	150.000.000	3,36	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di wilayah CDK V	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 5 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya	Jumlah Pemegang	Unit	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		SEKSI	CDK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan *****	Management				25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	WILAYAH V JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <2.000 m3/Tahun di wilayah CDK V	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 5 ****	Unit	3	3	3	25.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK VI	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 6	%	1,38	1,81	2,24	50.000.000	2,67	130.000.000	3,1	130.000.000	3,53	150.000.000	3,96	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							***														WILAYAH VI	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di wilayah CDK VI	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 6 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan *****	Unit Management	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VI JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <2.000 m3/Tahun di wilayah CDK VI	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 6 ****	Unit	3	3	3	25.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VI JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK VIII	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 8 ***	%	1,03	1,29	1,55	50.000.000	1,81	130.000.000	2,07	130.000.000	2,33	150.000.000	2,58	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di wilayah CDK VIII	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 8 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****																	
						Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan *****	Unit Management	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <2.000 m3/Tahun di wilayah CDK VIII	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 8 ****	Unit	2	2	2	25.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					IX	
						Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK IX	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 9 ***	%	1,29	1,72	2,15	50.000.000	2,58	130.000.000	3,01	130.000.000	3,45	150.000.000	3,88	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di wilayah CDK IX	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 9 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan *****	Unit Management	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya	Jumlah unit	Unit	3	3	3		3		3		3		3		SEKSI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <2.000 m3/Tahun	pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 9 ****					25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK X	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 10 ***	%	1,03	1,29	1,55	50.000.000	1,81	130.000.000	2,07	130.000.000	2,33	150.000.000	2,58	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Wilayah CDK X	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 10 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis)							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****																Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan *****	Unit Management	N/A	N/A	6	25.000.000	6	65.000.000	6	65.000.000	6	75.000.000	6	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH X JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <2.000 m3/Tahun di wilayah CDK X	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 10 ****	Unit	2	2	2	25.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH X JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLA									50.000.00		130.000.0		130.000.0		150.000.0		160.000.0	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			AN HUTAN ***									0		00		00		00		00	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK XI	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 11 ***	%	1,12	1,46	1,81	50.000.000	2,15	130.000.000	2,5	130.000.000	2,84	150.000.000	3,19	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di wilayah CDK XI	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 11 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan *****	Unit Management	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH XI JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				<6000 m3/Tahun ****																		
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <2.000 m3/Tahun di wilayah CDK XI	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 11 ****	Unit	3	3	3	25.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH XI JAWA TENGAH
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									50.000.000		130.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK VII	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 7 ***	%	1,29	1,64	1,98	50.000.000	2,33	130.000.000	2,67	130.000.000	3,01	150.000.000	3,36	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di wilayah CDK VII	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK 7 ****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan *****	Unit Management	N/A	N/A	N/A	25.000.000	N/A	65.000.000	N/A	65.000.000	N/A	75.000.000	N/A	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VII JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ****								25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <2.000 m3/Tahun di wilayah CDK VII	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK 7 ****	Unit	3	3	3	25.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							25.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha	Laporan	1	1	1	25.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDU	CDK WILAYAH VII JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						yang menjadi kewenangan provinsi	kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****														NGAN HUTAN	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ***									400.000.000		710.000.000		1.286.000.000		1.520.000.000		1.823.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan ***	%	13,7	17,83	21,96	400.000.000	26,1	710.000.000	30,23	1.286.000.000	34,37	1.520.000.000	38,5	1.823.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
		3.28.03.1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi ****								110.000.000		170.000.000		440.000.000		470.000.000		510.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terlaksananya review Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat provinsi	Jumlah dokumen penatagunaan kawasan hutan ****	Dokumen	5	5	6	110.000.000	6	170.000.000	5	440.000.000	5	470.000.000	5	510.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
		3.28.03.1.01.0010			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH) *****							80.000.000		100.000.000		240.000.000		250.000.000		260.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Laporan data, informasi dan perkembangan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	80.000.000	N/A	100.000.000	N/A	240.000.000	N/A	250.000.000	N/A	260.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						penggunaan kawasan hutan	pelaksanaan kegiatan penggunaan kawasan hutan *****															Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
		3.28.03.1.01.0011			Review atau revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) *****							30.000.000		70.000.000		200.000.000		220.000.000		250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terlaksananya review atau revisi RKTP dan penetapan review atau revisi RKTP	Dokumen review atau revisi RKTP yang disahkan *****	Dokumen	N/A	N/A	1	30.000.000	1	70.000.000	N/A	200.000.000	N/A	220.000.000	N/A	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	JAWA TENGAH
		3.28.03.1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung ****								30.000.000		80.000.000		136.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terselenggaranya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah dokumen data informasi pemanfaatan hutan ****	Unit	1	1	1	30.000.000	1	80.000.000	1	136.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
		3.28.03.1.03.0001			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi *****							30.000.000		80.000.000		136.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Tersedianya Data	Jumlah Data dan	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1		Dinas	JAWA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala *****					30.000.000		80.000.000		136.000.000		150.000.000		160.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	TENGAH
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ****								110.000.000		180.000.000		260.000.000		300.000.000		350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang ****	Unit	N/A	8	8	110.000.000	8	180.000.000	8	260.000.000	8	300.000.000	8	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
		3.28.03.1.06.0007			Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							30.000.000		80.000.000		90.000.000		110.000.000		140.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terlaksananya pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu skala dan menengah kecil yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani *****	Unit Management	12	12	12	30.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	110.000.000	12	140.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	JAWA TENGAH
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan							80.000.000		100.000.000		170.000.000		190.000.000		210.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****																Penyuluhan Kehutanan	
						Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan *****	Unit Management	4	4	4	80.000.000	4	100.000.000	4	170.000.000	4	190.000.000	4	210.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ****								150.000.000		280.000.000		450.000.000		600.000.000		803.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan ****	Unit	183	183	183	150.000.000	183	280.000.000	183	450.000.000	183	600.000.000	183	803.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							50.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****	Laporan	12	12	12	50.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.0005			Pengendalian PBPHH (Kayu							50.000.00		80.000.00		150.000.0		200.000.0		250.000.0	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							0		0		00		00		00	Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif *****	Unit Management	2	2	4	50.000.000	4	80.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.0006			Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi *****							50.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		303.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terlaksananya Pemantauan/Monitoring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah *****	Unit Management	12	12	12	50.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	303.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN ***									210.000.000		380.000.000		380.000.000		775.000.000		1.033.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK I	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 1 ***	%	0,3	0,3	0,3	210.000.000	0,3	380.000.000	0,3	380.000.000	0,3	775.000.000	0,3	1.033.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					WILAYAH I	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ****								210.000.000		380.000.000		380.000.000		775.000.000		1.033.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di wilayah CDK I	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 1 ****	Kelompok	3	3	3	210.000.000	3	380.000.000	3	380.000.000	3	775.000.000	3	1.033.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan *****							150.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan *****	Kelompok	130	130	130	150.000.000	130	250.000.000	130	250.000.000	130	350.000.000	130	450.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan *****							30.000.000		65.000.000		65.000.000		75.000.000		133.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya *****	Orang	60	60	60	30.000.000	60	65.000.000	60	65.000.000	60	75.000.000	60	133.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial *****							30.000.000		65.000.000		65.000.000		350.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya *****	Unit	5	5	5	30.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	350.000.000	5	450.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH I Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN ***									210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK II	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 2 ***	%	0,2	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ****								210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di wilayah CDK II	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 2 ****	Kelompok	2	2	2	210.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	2	480.000.000	2	690.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan *****							150.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang	Kelompok	101	101	101	150.000.000	101	250.000.000	101	250.000.000	101	350.000.000	101	450.000.000	SEKSI PENYULUHAN,	CDK WILAYAH II JAW

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan *****														PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	A TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya *****	Orang	60	60	60	30.000.000	60	55.000.000	60	55.000.000	60	65.000.000	60	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya *****	Unit	5	5	5	30.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	65.000.000	5	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH II JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN ***									210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK III	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 3 ***	%	0,2	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi								210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ****																		
						Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di wilayah CDK III	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 3 ****	Kelompok	2	2	2	210.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	2	480.000.000	2	690.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan *****							150.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan *****	Kelompok	109	109	109	150.000.000	109	250.000.000	109	250.000.000	109	350.000.000	109	450.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya *****	Orang	60	60	60	30.000.000	60	55.000.000	60	55.000.000	60	65.000.000	60	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya *****	Unit	5	5	5	30.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	65.000.000	5	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH III JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM																		Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN ***									210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK IV	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 4 ***	%	0,2	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ****								210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di wilayah CDK IV	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 4 ****	Kelompok	2	2	2	210.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	2	480.000.000	2	690.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan *****							150.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan *****	Kelompok	54	54	54	150.000.000	54	250.000.000	54	250.000.000	54	350.000.000	54	450.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Bidang Kehutanan *****																Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya *****	Orang	60	60	60	30.000.000	60	55.000.000	60	55.000.000	60	65.000.000	60	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya *****	Unit	5	5	5	30.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	65.000.000	5	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH IV JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN ***									210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK V	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 5 ***	%	0,3	0,3	0,3	210.000.000	0,3	360.000.000	0,3	360.000.000	0,3	480.000.000	0,3	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				****																		
						Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di wilayah CDK V	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 5 ****	Kelompok	3	3	3	210.000.000	3	360.000.000	3	360.000.000	3	480.000.000	3	690.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan *****							150.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan *****	Kelompok	75	75	75	150.000.000	75	250.000.000	75	250.000.000	75	350.000.000	75	450.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya *****	Orang	60	60	60	30.000.000	60	55.000.000	60	55.000.000	60	65.000.000	60	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya *****	Unit	5	5	5	30.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	65.000.000	5	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH V JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDA									210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			YAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN ***																			
						Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VI	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 6 ***	%	0,2	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ****								210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di wilayah CDK VI	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 6 ****	Kelompok	2	2	2	210.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	2	480.000.000	2	690.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan *****							150.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan *****	Kelompok	107	107	107	150.000.000	107	250.000.000	107	250.000.000	107	350.000.000	107	450.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VI JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya SDM bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang	Orang	60	60	60	30.000.00	60	55.000.00	60	55.000.00	60	65.000.00	60	120.000.0	SEKSI PENYULUH	CDK WILAYAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						yang Meningkat	meningkat kapasitasnya *****					0		0		0		0		00	AN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	VI JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya *****	Unit	5	5	5	30.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	65.000.000	5	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VI JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN ***									210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VIII	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 8 ***	%	0,2	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ****								210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 8 ****	Kelompok	2	2	2	210.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	2	480.000.000	2	690.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Masyarakat di Bidang Kehutanan di wilayah CDK VIII															TAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan *****							150.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan *****	Kelompok	72	72	72	150.000.000	72	250.000.000	72	250.000.000	72	350.000.000	72	450.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya *****	Orang	60	60	60	30.000.000	60	55.000.000	60	55.000.000	60	65.000.000	60	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya *****	Unit	5	5	5	30.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	65.000.000	5	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VIII JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAK									210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			AT DI BIDANG KEHUTANAN ***																			
						Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK IX	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 9 ***	%	0,2	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ****								210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di wilayah CDK IX	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 9 ****	Kelompok	2	2	2	210.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	2	480.000.000	2	690.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan *****							150.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan *****	Kelompok	69	69	69	150.000.000	69	250.000.000	69	250.000.000	69	350.000.000	69	450.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya *****	Orang	60	60	60	30.000.000	60	55.000.000	60	55.000.000	60	65.000.000	60	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAA	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					TAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya *****	Unit	5	5	5	30.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	65.000.000	5	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH IX JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN ***									210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK X	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 10 ***	%	0,2	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ****								210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di wilayah CDK X	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 10 ****	Kelompok	2	2	2	210.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	2	480.000.000	2	690.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan *****							150.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan *****	Kelompok	105	105	105	150.000.000	105	250.000.000	105	250.000.000	105	350.000.000	105	450.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH X JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya *****	Orang	60	60	60	30.000.000	60	55.000.000	60	55.000.000	60	65.000.000	60	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH X JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya *****	Unit	5	5	5	30.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	65.000.000	5	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH X JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN ***									210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Meningkatnya kualitas sumberdaya	Persentase peningkatan kelas	%	0,2	0,2	0,2	210.000.0	0,2	360.000.0	0,2	360.000.0	0,2	480.000.0	0,2	690.000.0	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK XI	kelompok masyarakat CDK 11 ***					00		00		00		00		00		Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ****								210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di wilayah CDK XI	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 11 ****	Kelompok	2	2	2	210.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	2	480.000.000	2	690.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan *****							150.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan *****	Kelompok	57	57	57	150.000.000	57	250.000.000	57	250.000.000	57	350.000.000	57	450.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH XI JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya *****	Orang	60	60	60	30.000.000	60	55.000.000	60	55.000.000	60	65.000.000	60	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH XI JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan							30.000.00		55.000.00		55.000.00		65.000.00		120.000.0	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Sosial *****							0		0		0		0		00	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya *****	Unit	N/A	N/A	N/A	30.000.000	N/A	55.000.000	N/A	55.000.000	N/A	65.000.000	N/A	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH XI JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN ***									210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VII	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 7 ***	%	0,3	0,3	0,3	210.000.000	0,3	360.000.000	0,3	360.000.000	0,3	480.000.000	0,3	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ****								210.000.000		360.000.000		360.000.000		480.000.000		690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di wilayah CDK VII	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 7 ****	Kelompok	3	3	3	210.000.000	3	360.000.000	3	360.000.000	3	480.000.000	3	690.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani							150.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Hutan *****																CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan *****	Kelompok	121	121	121	150.000.000	121	250.000.000	121	250.000.000	121	350.000.000	121	450.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VII JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0007			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya *****	Orang	60	60	60	30.000.000	60	55.000.000	60	55.000.000	60	65.000.000	60	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VII JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial *****							30.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya *****	Unit	5	5	5	30.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	65.000.000	5	120.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	CDK WILAYAH VII JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN ***									430.000.000		655.000.000		1.250.000.000		1.450.000.000		1.700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat ***	%	2,5	2,5	2,5	430.000.000	2,5	655.000.000	2,5	1.250.000.000	2,5	1.450.000.000	2,5	1.700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ****								430.000.000		655.000.000		1.250.000.000		1.450.000.000		1.700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terselenggaranya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya ****	Kelompok	25	25	25	430.000.000	25	655.000.000	25	1.250.000.000	25	1.450.000.000	25	1.700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan *****							100.000.000		200.000.000		400.000.000		500.000.000		550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan *****	Kelompok	1000	1000	1000	100.000.000	1000	200.000.000	1000	400.000.000	1000	500.000.000	1000	550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0004			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan *****							80.000.000		200.000.000		380.000.000		400.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Kehutanan	
						Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas *****	Orang	90	90	90	80.000.000	90	200.000.000	90	380.000.000	90	400.000.000	90	450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0008			Penyiapan Perhutanan Sosial *****							100.000.000		55.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial *****	Hektar	N/A	N/A	N/A	100.000.000	N/A	55.000.000	N/A	150.000.000	N/A	200.000.000	N/A	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial *****							150.000.000		200.000.000		320.000.000		350.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya *****	Unit	5	5	5	150.000.000	5	200.000.000	5	320.000.000	5	350.000.000	5	450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat												132.287.422.000		139.419.121.000		148.602.795.000		154.747.535.000		159.942.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
daerah berintegritas dan dinamis *																						
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah *	Angka	70	70	70		70		70		70		70		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah **											780.000.000		900.000.000		920.000.000		1.140.000.000		1.462.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah **	Angka	2,65	3	3	780.000.000	3	900.000.000	3	920.000.000	3	1.140.000.000	3	1.462.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									780.000.000		900.000.000		920.000.000		1.140.000.000		1.462.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ***	%	100	100	100	780.000.000	100	900.000.000	100	920.000.000	100	1.140.000.000	100	1.462.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								780.000.000		900.000.000		920.000.000		1.140.000.000		1.462.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	100	780.000.000	100	900.000.000	100	920.000.000	100	1.140.000.000	100	1.462.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							350.000.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000		652.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	8	9	8	350.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	8	500.000.000	8	652.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.			Evaluasi Kinerja																Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		01.0007			Perangkat Daerah *****							350.000.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000		650.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	5	5	5	350.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	5	500.000.000	5	650.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	60	60	60	40.000.000	60	50.000.000	60	60.000.000	60	70.000.000	60	80.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	-, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	1	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	-, JAWA TENGAH OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah **											131.507.422.000		138.519.121.000		147.682.795.000		153.607.535.000		158.480.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah **	Angka	89,25	85	85	131.507.422.000	85	138.519.121.000	85	147.682.795.000	85	153.607.535.000	85	158.480.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									123.397.635.000		126.402.621.000		129.126.755.000		132.090.000.000		134.820.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	100	123.397.635.000	100	126.402.621.000	100	129.126.755.000	100	132.090.000.000	100	134.820.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								118.752.435.000		119.160.000.000		120.160.000.000		121.220.000.000		122.270.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terselenggaranya	Jumlah jenis	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1		SUB	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****					118.752.435.000		119.160.000.000		120.160.000.000		121.220.000.000		122.270.000.000	BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							118.612.435.000		119.000.000.000		120.000.000.000		121.000.000.000		122.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	665	665	665	118.612.435.000	665	119.000.000.000	665	120.000.000.000	665	121.000.000.000	665	122.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							60.000.000		70.000.000		70.000.000		100.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	1	1	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							80.000.000		90.000.000		90.000.000		120.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD *****	Laporan	12	12	12	80.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								160.000.000		160.000.000		160.000.000		250.000.000		280.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	250.000.000	1	280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							160.000.000		160.000.000		160.000.000		250.000.000		280.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terlaksananya	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1		SUB	JAWA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****					160.000.000		160.000.000		160.000.000		250.000.000		280.000.000	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								120.000.000		430.000.000		430.000.000		590.000.000		720.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	120.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	100	590.000.000	100	720.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****							20.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							100.000.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	10	10	10	100.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	500.000.000	10	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								815.000.000		1.087.000.000		1.287.000.000		1.715.000.000		1.950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	815.000.000	100	1.087.000.000	100	1.287.000.000	100	1.715.000.000	100	1.950.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							25.000.000		40.000.000		40.000.000		60.000.000		70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	25.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.			Penyediaan																Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		06.0002			Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							50.000.000		80.000.000		80.000.000		110.000.000		120.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	50.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							65.000.000		75.000.000		75.000.000		90.000.000		100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	65.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							75.000.000		90.000.000		90.000.000		110.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	75.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							50.000.000		90.000.000		90.000.000		110.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	50.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							10.000.000		12.000.000		12.000.000		15.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							140.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	140.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi							400.000.000		500.000.000		700.000.000		970.000.000		1.100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					SKPD *****																Kehutanan	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	400.000.000	1	500.000.000	1	700.000.000	1	970.000.000	1	1.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								565.200.000		2.150.621.000		2.869.755.000		3.260.000.000		3.810.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1	565.200.000	1	2.150.621.000	1	2.869.755.000	1	3.260.000.000	1	3.810.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							565.200.000		860.621.000		1.279.755.000		1.360.000.000		1.590.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	2	1	2	565.200.000	3	860.621.000	3	1.279.755.000	3	1.360.000.000	3	1.590.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		90.000.000		90.000.000		100.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	90.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		500.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	500.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	1	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		500.000.000		700.000.000		800.000.000		900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	500.000.000	1	700.000.000	1	800.000.000	1	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana							0		0		0		0		0	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****																	Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		200.000.000		200.000.000		300.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								2.295.000.000		2.470.000.000		2.770.000.000		3.020.000.000		3.320.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1	1	1	2.295.000.000	1	2.470.000.000	1	2.770.000.000	1	3.020.000.000	1	3.320.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							600.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	600.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000	1	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan							180.000.000		200.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Kantor *****																Kehutanan	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	180.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1.500.000.000		1.550.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	1.500.000.000	1	1.550.000.000	1	1.700.000.000	1	1.800.000.000	1	1.900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								690.000.000		945.000.000		1.450.000.000		2.035.000.000		2.470.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1	690.000.000	1	945.000.000	1	1.450.000.000	1	2.035.000.000	1	2.470.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							460.000.000		500.000.000		700.000.000		800.000.000		900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	18	19	19	460.000.000	19	500.000.000	19	700.000.000	19	800.000.000	19	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							30.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		X.XX.01.1.			Pemeliharaan																Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		09.0006			Peralatan dan Mesin Lainnya *****							105.000.000		150.000.000		225.000.000		300.000.000		400.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	105.000.000	1	150.000.000	1	225.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							65.000.000		70.000.000		200.000.000		400.000.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	65.000.000	1	70.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							15.000.000		100.000.000		200.000.000		400.000.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	15.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							15.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	15.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									463.500.000		772.000.000		2.197.000.000		2.456.000.000		2.818.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPL2H	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H ***	%	100	100	100	463.500.000	100	772.000.000	100	2.197.000.000	100	2.456.000.000	100	2.818.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								25.000.000		27.000.000		29.000.000		30.000.000		32.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di BPL2H	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah BPL2H ****	Dokumen	1	1	1	25.000.000	1	27.000.000	1	29.000.000	1	30.000.000	1	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							25.000.000		27.000.000		29.000.000		30.000.000		32.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	25.000.000	1	27.000.000	1	29.000.000	1	30.000.000	1	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat								71.500.000		87.000.000		209.000.000		251.000.000		305.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Daerah ****																	Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di BPL2H	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BPL2H ****	%	100	100	100	71.500.000	100	87.000.000	100	209.000.000	100	251.000.000	100	305.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.000.000		6.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							4.000.000		6.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratoriu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						m Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							4.000.000		6.000.000		10.000.000		15.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							5.000.000		6.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							4.000.000		6.000.000		10.000.000		15.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							4.500.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	4.500.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						- Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							40.000.000		45.000.000		120.000.000		130.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	40.000.000	1	45.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		140.000.000		1.360.000.000		1.500.000.000		1.740.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di BPL2H	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan BPL2H ****	Unit	1	1	1	0	1	140.000.000	1	1.360.000.000	1	1.500.000.000	1	1.740.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratoriu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					m Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		20.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	N/A	1	0	1	20.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000	1	1.500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan								202.000.000		233.000.000		264.000.000		290.000.000		311.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pemerintahan Daerah ****																	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPL2H	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BPL2H ****	Laporan	1	1	1	202.000.000	1	233.000.000	1	264.000.000	1	290.000.000	1	311.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		95.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratoriu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						m Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							10.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							130.000.000		140.000.000		150.000.000		155.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	155.000.000	1	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang								165.000.000		285.000.000		335.000.000		385.000.000		430.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Urusan Pemerintahan Daerah ****																	Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPL2H	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BPL2H ****	Unit	1	1	1	165.000.000	1	285.000.000	1	335.000.000	1	385.000.000	1	430.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							130.000.000		135.000.000		145.000.000		155.000.000		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	130.000.000	1	135.000.000	1	145.000.000	1	155.000.000	1	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratoriu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						m Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							20.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	20.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									618.000.000		927.000.000		927.000.000		1.999.000.000		2.271.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1 ***	%	100	100	100	618.000.000	100	927.000.000	100	927.000.000	100	1.999.000.000	100	2.271.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang								20.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								0		0		0		0		0	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di CDK I	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 1 ****	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							20.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								81.000.000		104.000.000		104.000.000		280.000.000		336.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di CDK I	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 ****	%	100	100	100	81.000.000	100	104.000.000	100	104.000.000	100	280.000.000	100	336.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							4.000.000		6.000.000		6.000.000		10.000.000		15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							6.000.000		7.000.000		7.000.000		25.000.000		30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya	Jumlah Paket	Paket	1	1	1		1		1		1		1		SUB	Kab Blora,

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****					6.000.000		7.000.000		7.000.000		25.000.000		30.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							4.000.000		6.000.000		6.000.000		15.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							4.000.000		6.000.000		6.000.000		10.000.000		15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							4.000.000		6.000.000		6.000.000		15.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		3.000.000		3.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	1	1	1	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA	Kab Blora, Rembang dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Perundang-Undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan *****														USAHA	Grobogan, JAWA TENGAH< br>OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							9.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000		60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	9.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH< br>OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							50.000.000		60.000.000		60.000.000		150.000.000		170.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH< br>OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		109.000.000		109.000.000		293.000.000		336.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK I	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 1 ****	Unit	1	1	1	0	1	109.000.000	1	109.000.000	1	293.000.000	1	336.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		3.000.000		3.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Kab Blora, Rembang dan Grobogan,

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		10.000.000		10.000.000		170.000.000		180.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		60.000.000		60.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		6.000.000		6.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Kab Blora, Rembang dan Grobogan, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								367.000.000		457.000.000		457.000.000		516.000.000		579.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK I	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1 ****	Laporan	1	1	1	367.000.000	1	457.000.000	1	457.000.000	1	516.000.000	1	579.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							2.000.000		6.000.000		6.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	2.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							75.000.000		95.000.000		95.000.000		100.000.000		110.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	75.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		6.000.000		6.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	0	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							290.000.000		350.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	1	1	1	290.000.0	1	350.000.0	1	350.000.0	1	400.000.0	1	450.000.0	SUB BAGIAN	Dinas Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****					00		00		00		00		00	TATA USAHA	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								150.000.000		227.000.000		227.000.000		870.000.000		970.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK I	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 1 ****	Unit	1	1	1	150.000.000	1	227.000.000	1	227.000.000	1	870.000.000	1	970.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							110.000.000		145.000.000		145.000.000		170.000.000		190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	110.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	170.000.000	1	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							25.000.000		40.000.000		40.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	25.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA	Dinas Lingkungan Hidup dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Lainnya	*****														USAHA	Kehutanan - CDK WILAYAH I
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							10.000.000		6.000.000		6.000.000		100.000.000		110.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		3.000.000		3.000.000		25.000.000		30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		3.000.000		3.000.000		450.000.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									501.000.000		912.000.000		912.000.000		1.158.000.000		1.309.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2 ***	%	100	100	100	501.000.000	100	912.000.000	100	912.000.000	100	1.158.000.000	100	1.309.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
		X.XX.01.1.		Administra																	Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		03		si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								15.000.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000		35.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di CDK II	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 2 ****	Dokumen	1	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							15.000.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								75.000.000		100.000.000		100.000.000		135.000.000		156.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di CDK II	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 2 ****	%	100	100	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	135.000.000	100	156.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							3.000.000		6.000.000		6.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							4.000.000		6.000.000		6.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Disediakan *****															- CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							6.000.000		7.000.000		7.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							4.000.000		6.000.000		6.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							4.000.000		6.000.000		6.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		3.000.000		3.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							4.000.000		6.000.000		6.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	10.000.00	SUB BAGIAN	Dinas Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Tamu	Tamu *****													0	TATA USAHA	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							50.000.000		60.000.000		60.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		109.000.000		109.000.000		135.000.000		169.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK II	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 2 ****	Unit	1	1	1	0	1	109.000.000	1	109.000.000	1	135.000.000	1	169.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		3.000.000		3.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		10.000.000		10.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0		60.000.000		60.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					*****																Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		6.000.000		6.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								316.000.000		453.000.000		453.000.000		557.000.000		615.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK II	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 2 ****	Laporan	1	1	1	316.000.000	1	453.000.000	1	453.000.000	1	557.000.000	1	615.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		2.000.000		2.000.000		4.000.000		5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						- CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							65.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	65.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		6.000.000		6.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	0	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							250.000.000		350.000.000		350.000.000		450.000.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	250.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								95.000.000		230.000.000		230.000.000		301.000.000		334.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK II	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 2 ****	Unit	1	1	1	95.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	301.000.000	1	334.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.			Penyediaan Jasa																Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		09.0001			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							70.000.000		145.000.000		145.000.000		170.000.000		190.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	70.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	170.000.000	1	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.000.000		40.000.000		40.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							10.000.000		6.000.000		6.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		6.000.000		6.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	1	1	1	0	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA	Dinas Lingkungan Hidup dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****															USAHA	Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		3.000.000		3.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									519.000.000		737.000.000		820.000.000		883.000.000		978.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3 ***	%	100	100	100	519.000.000	100	737.000.000	100	820.000.000	100	883.000.000	100	978.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								4.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di CDK III	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 3 ****	Dokumen	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							4.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						WILAYAH III
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								92.000.000		117.000.000		134.000.000		151.000.000		168.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di CDK III	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 3 ****	%	100	100	100	92.000.000	100	117.000.000	100	134.000.000	100	151.000.000	100	168.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							3.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							7.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							6.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							13.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi							50.000.00		60.000.00		70.000.00		80.000.00		90.000.00	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					dan Konsultasi SKPD *****							0		0		0		0		0		Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		109.000.000		132.000.000		135.000.000		169.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK III	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 3 ****	Unit	1	1	1	0	1	109.000.000	1	132.000.000	1	135.000.000	1	169.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.			Pengadaan Gedung							0									Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		07.0009			Kantor atau Bangunan Lainnya *****									60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		30.000.000		40.000.000		30.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	30.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								321.000.000		373.000.000		405.000.000		437.000.000		470.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK III	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 3 ****	Laporan	1	1	1	321.000.000	1	373.000.000	1	405.000.000	1	437.000.000	1	470.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.			Penyediaan Jasa																Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		08.0001			Surat Menyurat *****							1.000.000		2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							80.000.000		90.000.000		95.000.000		100.000.000		105.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	80.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	0	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							240.000.000		275.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	240.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang								102.000.000		132.000.000		142.000.000		152.000.000		162.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****																	Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK III	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 3 ****	Unit	1	1	1	102.000.000	1	132.000.000	1	142.000.000	1	152.000.000	1	162.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							75.000.000		90.000.000		95.000.000		100.000.000		105.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	75.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							12.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	12.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					HUTAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									567.200.000		819.000.000		901.500.000		984.000.000		1.082.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK IV	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4 ***	%	100	100	100	567.200.000	100	819.000.000	100	901.500.000	100	984.000.000	100	1.082.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								12.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di CDK IV	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 4 ****	Dokumen	1	1	1	12.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							12.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	12.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								80.000.000		126.000.000		143.000.000		160.000.000		177.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di CDK IV	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 4 ****	%	100	100	100	80.000.000	100	126.000.000	100	143.000.000	100	160.000.000	100	177.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							4.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							7.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	7.000.000	N/A	11.000.000	N/A	12.000.000	N/A	13.000.000	N/A	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							4.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							5.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					IV	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							7.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	7.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		109.000.000		132.000.000		135.000.000		169.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK IV	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 4 ****	Unit	1	1	1	0	1	109.000.000	1	132.000.000	1	135.000.000	1	169.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		30.000.000		40.000.000		30.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	30.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	Unit	1	1	1	0	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.00	SUB BAGIAN	Dinas Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****														0	TATA USAHA	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								375.200.000		418.000.000		449.500.000		481.000.000		512.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK IV	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 4 ****	Laporan	1	1	1	375.200.000	1	418.000.000	1	449.500.000	1	481.000.000	1	512.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.200.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.200.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							70.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	70.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							4.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Laporan	1	1	1	4.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Kantor yang Disediakan *****															- CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							300.000.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	300.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	1	375.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								100.000.000		150.000.000		160.000.000		190.000.000		205.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK IV	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 4 ****	Unit	1	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	190.000.000	1	205.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							75.000.000		95.000.000		100.000.000		125.000.000		135.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	75.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya	Jumlah Mebel yang	Unit	1	1	1		1		1		1		1		SUB	Dinas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Pemeliharaan Mebel	Dipelihara *****					5.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Unit	1	1	1	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA	Dinas Lingkungan Hidup dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****															USAHA	Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									482.500.000		770.000.000		873.000.000		948.000.000		1.031.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK V	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5 ***	%	100	100	100	482.500.000	100	770.000.000	100	873.000.000	100	948.000.000	100	1.031.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								17.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di CDK V	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 5 ****	Dokumen	1	1	1	17.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							17.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	17.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								77.500.000		120.000.000		137.000.000		156.000.000		172.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di CDK V	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 5 ****	%	100	100	100	77.500.000	100	120.000.000	100	137.000.000	100	156.000.000	100	172.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.			Penyediaan																Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		06.0001			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							5.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							5.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.500.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Barang	Jumlah Paket	Paket	1	1	1		1		1		1		1		SUB	Dinas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****					2.500.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							5.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	5.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		109.000.000		132.000.000		135.000.000		169.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	1	1	1	0	1	109.000.000	1	132.000.000	1	135.000.000	1	169.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						di CDK V	yang disediakan CDK 5 ****															
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		30.000.000		40.000.000		30.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	30.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau							0		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Bangunan Lainnya *****																CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								316.000.000		393.000.000		435.000.000		467.000.000		499.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK V	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 5 ****	Laporan	1	1	1	316.000.000	1	393.000.000	1	435.000.000	1	467.000.000	1	499.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							80.000.000		90.000.000		95.000.000		100.000.000		105.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	80.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Laporan	1	1	1	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA	Dinas Lingkungan Hidup dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****														USAHA	Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							235.000.000		290.000.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	235.000.000	1	290.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	1	375.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								72.000.000		118.000.000		134.000.000		150.000.000		146.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK V	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 5 ****	Unit	1	1	1	72.000.000	1	118.000.000	1	134.000.000	1	150.000.000	1	146.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							50.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							2.000.000		4.000.000		6.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	2.000.000	1	4.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	10.000.00	SUB BAGIAN	Dinas Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																				0	TATA USAHA	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili	Unit	1	1	1	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							tasi *****															
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									528.000.000		887.000.000		969.000.000		1.036.000.000		1.119.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6 ***	%	100	100	100	528.000.000	100	887.000.000	100	969.000.000	100	1.036.000.000	100	1.119.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								16.000.000		19.000.000		20.000.000		21.000.000		22.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di CDK VI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 6 ****	Dokumen	1	1	1	16.000.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							16.000.000		19.000.000		20.000.000		21.000.000		22.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	16.000.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								76.000.000		156.000.000		173.000.000		190.000.000		207.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di CDK VI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 6 ****	%	100	100	100	76.000.000	100	156.000.000	100	173.000.000	100	190.000.000	100	207.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan							3.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Bangunan Kantor *****																Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							5.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							5.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.000.000		18.000.000		19.000.000		20.000.000		21.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					WILAYAH VI	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							5.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	5.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta								0		109.000.000		132.000.000		135.000.000		169.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				h Daerah ****																		
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK VI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 6 ****	Unit	1	1	1	0	1	109.000.000	1	132.000.000	1	135.000.000	1	169.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		30.000.000		40.000.000		30.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Sarana	Jumlah Unit Sarana	Unit	1	1	1	0	1		1		1		1		SUB	Dinas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****							30.000.000		40.000.000		30.000.000		50.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								321.000.000		398.000.000		424.000.000		450.000.000		471.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK VI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 6 ****	Laporan	1	1	1	321.000.000	1	398.000.000	1	424.000.000	1	450.000.000	1	471.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							95.000.000		145.000.000		155.000.000		165.000.000		170.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	1	1	1	95.000.000	1	145.000.000	1	155.000.000	1	165.000.000	1	170.000.000	SUB BAGIAN TATA	Dinas Lingkungan Hidup dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****															USAHA	Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							10.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							215.000.000		230.000.000		240.000.000		250.000.000		260.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	215.000.000	1	230.000.000	1	240.000.000	1	250.000.000	1	260.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								115.000.000		205.000.000		220.000.000		240.000.000		250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK VI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 6 ****	Unit	1	1	1	115.000.000	1	205.000.000	1	220.000.000	1	240.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							90.000.000		100.000.000		110.000.000		125.000.000		130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	90.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							10.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Reha	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	1	1	1	0	1	16.000.00	1	17.000.00	1	18.000.00	1	19.000.00	SUB BAGIAN	Dinas Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****							0		0		0		0	TATA USAHA	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	26.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									458.000.000		675.000.000		747.000.000		799.000.000		882.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VIII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8 ***	%	100	100	100	458.000.000	100	675.000.000	100	747.000.000	100	799.000.000	100	882.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								7.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di CDK VIII	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 8 ****	Dokumen	1	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							7.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA	Dinas Lingkungan Hidup dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						SKPD	SKPD *****														USAHA	Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								75.000.000		115.000.000		132.000.000		149.000.000		166.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di CDK VIII	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 8 ****	%	100	100	100	75.000.000	100	115.000.000	100	132.000.000	100	149.000.000	100	166.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							3.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							5.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	5.000.000	N/A	10.000.000	N/A	11.000.000	N/A	12.000.000	N/A	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							5.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	5.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi							50.000.00		60.000.00		70.000.00		80.000.00		90.000.00	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					dan Konsultasi SKPD *****							0		0		0		0		0		Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		109.000.000		132.000.000		135.000.000		169.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK VIII	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 8 ****	Unit	1	1	1	0	1	109.000.000	1	132.000.000	1	135.000.000	1	169.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					*****																Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		30.000.000		40.000.000		30.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	30.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								281.000.000		302.000.000		314.000.000		326.000.000		338.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK VIII	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 8 ****	Laporan	1	1	1	281.000.000	1	302.000.000	1	314.000.000	1	326.000.000	1	338.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							5.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							225.000.000		240.000.000		245.000.000		250.000.000		255.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	225.000.000	1	240.000.000	1	245.000.000	1	250.000.000	1	255.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								95.000.000		142.000.000		161.000.000		180.000.000		199.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pemerintahan Daerah ****																		
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK VIII	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 8 ****	Unit	1	1	1	95.000.000	1	142.000.000	1	161.000.000	1	180.000.000	1	199.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							10.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					*****																CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									384.000.000		567.500.000		638.000.000		670.000.000		732.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK IX	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9 ***	%	100	100	100	384.000.000	100	567.500.000	100	638.000.000	100	670.000.000	100	732.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada								6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Perangkat Daerah ****																	WILAYAH IX	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di CDK IX	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 9 ****	Dokumen	1	1	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								87.000.000		104.000.000		120.000.000		137.000.000		152.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di CDK IX	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 9 ****	%	100	100	100	87.000.000	100	104.000.000	100	120.000.000	100	137.000.000	100	152.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							3.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	N/A	N/A	N/A	5.000.000	N/A	6.000.000	N/A	7.000.000	N/A	8.000.000	N/A	9.000.000	SUB BAGIAN	Dinas Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****														TATA USAHA	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Undangan	Undangan yang Disediakan *****															- CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							10.000.000		11.000.000		12.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		109.000.000		132.000.000		135.000.000		169.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK IX	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 9 ****	Unit	1	1	1	0	1	109.000.000	1	132.000.000	1	135.000.000	1	169.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						WILAYAH IX
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		30.000.000		40.000.000		30.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	30.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								211.000.000		242.500.000		263.000.000		274.000.000		286.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK IX	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 9 ****	Laporan	1	1	1	211.000.000	1	242.500.000	1	263.000.000	1	274.000.000	1	286.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							50.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		1.500.000		2.000.000		3.000.000		5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	0	1	1.500.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum							160.000.0		170.000.0		180.000.0		190.000.0		200.000.0	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Kantor *****							00		00		00		00		00	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								80.000.000		105.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK IX	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 9 ****	Unit	1	1	1	80.000.000	1	105.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							60.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						IX
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									493.000.000		651.000.000		689.000.000		702.000.000		746.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK X	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10 ***	%	100	100	100	493.000.000	100	651.000.000	100	689.000.000	100	702.000.000	100	746.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								14.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di wilayah CDK X	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 10 ****	Dokumen	1	1	1	14.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							14.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	14.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								83.000.000		101.000.000		111.000.000		121.000.000		131.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di wilayah CDK X	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 10 ****	%	100	100	100	83.000.000	100	101.000.000	100	111.000.000	100	121.000.000	100	131.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							7.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							7.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						X
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							8.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	8.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		99.000.000		112.000.000		125.000.000		139.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di wilayah CDK X	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 10 ****	Unit	1	1	1	0	1	99.000.000	1	112.000.000	1	125.000.000	1	139.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	N/A	N/A	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Unit	1	N/A	N/A	0	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA	Dinas Lingkungan Hidup dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****														USAHA	Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								296.000.000		331.000.000		341.000.000		331.000.000		351.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di wilayah CDK X	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 10 ****	Laporan	1	1	1	296.000.000	1	331.000.000	1	341.000.000	1	331.000.000	1	351.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							115.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	115.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		10.000.000		20.000.000		10.000.000		30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	0	1	10.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.			Penyediaan Jasa																Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		08.0004			Pelayanan Umum Kantor *****							180.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	180.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								100.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di wilayah CDK X	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 10 ****	Unit	1	1	1	100.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							75.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA									786.387.000		973.000.000		1.079.000.000		1.309.035.000		1.281.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			HAN DAERAH PROVINSI ***																		Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Tahura KGPAA MAngkunagoro I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah TAHURA ***	%	100	100	100	786.387.000	100	973.000.000	100	1.079.000.000	100	1.309.035.000	100	1.281.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								25.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di Balai Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah TAHURA ****	Dokumen	1	1	1	25.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							25.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	25.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								76.000.000		82.000.000		94.000.000		255.035.000		125.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunag	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					oro I Kelas A	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di Balai Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan TAHURA ****	%	100	100	100	76.000.000	100	82.000.000	100	94.000.000	100	255.035.000	100	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.000.000		6.000.000		7.000.000		12.600.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	12.600.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							4.000.000		6.000.000		7.000.000		14.873.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	14.873.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.000.000		6.000.000		7.000.000		15.577.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	1	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	15.577.00	1	10.000.00	SUB BAGIAN	Dinas Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Tangga	Tangga yang Disediakan *****											0		0	TATA USAHA	Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							4.000.000		6.000.000		7.000.000		15.510.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	15.510.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							4.000.000		6.000.000		7.000.000		27.600.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	27.600.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	0	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							4.000.000		6.000.000		7.000.000		17.375.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	4.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	17.375.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							50.000.000		40.000.000		45.000.000		143.500.000		55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	143.500.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta								0		109.000.000		132.000.000		135.000.000		169.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				h Daerah ****																	Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Balai Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan TAHURA ****	Unit	1	N/A	1	0	1	109.000.000	1	132.000.000	1	135.000.000	1	169.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		30.000.000		40.000.000		30.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	30.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								509.000.000		539.000.000		576.000.000		608.000.000		641.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				****																	Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Balai Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun TAHURA ****	Laporan	1	1	1	509.000.000	1	539.000.000	1	576.000.000	1	608.000.000	1	641.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							80.000.000		80.000.000		90.000.000		95.000.000		100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							8.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Jasa	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	1		1		1		1		1		SUB	Dinas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****					8.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							420.000.000		450.000.000		475.000.000		500.000.000		525.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	420.000.000	1	450.000.000	1	475.000.000	1	500.000.000	1	525.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								176.387.000		208.000.000		237.000.000		266.000.000		296.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Balai Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan TAHURA ****	Unit	1	1	1	176.387.000	1	208.000.000	1	237.000.000	1	266.000.000	1	296.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							130.000.000		135.000.000		140.000.000		145.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	130.000.000	1	135.000.000	1	140.000.000	1	145.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							31.387.000		13.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	31.387.000	1	13.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									828.200.000		1.098.000.000		4.973.040.000		5.409.000.000		5.846.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			DAERAH PROVINSI ***																		Raya Baturraden Kelas B	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Kebun Raya Baturraden	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah KRB ***	%	100	100	100	828.200.000	100	1.098.000.000	100	4.973.040.000	100	5.409.000.000	100	5.846.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								40.000.000		45.000.000		70.000.000		80.000.000		100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di Balai Kebun Raya Baturraden	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah KRB ****	Dokumen	1	1	1	40.000.000	1	45.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							40.000.000		45.000.000		70.000.000		80.000.000		100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	40.000.000	1	45.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								122.000.000		210.000.000		350.000.000		425.000.000		510.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di Balai Kebun Raya Baturraden	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan KRB ****	%	100	100	100	122.000.000	100	210.000.000	100	350.000.000	100	425.000.000	100	510.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							5.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA BARAT OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							5.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							7.000.000		20.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							10.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	35.000.000	N/A	40.000.000	N/A	45.000.000	N/A	50.000.000	N/A	55.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan							0		10.000.000		15.000.000		20.000.000		30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Perundang-Undangan *****																Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	10.000.000	N/A	15.000.000	N/A	20.000.000	N/A	30.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							10.000.000		20.000.000		55.000.000		70.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	55.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							50.000.000		60.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000	1	105.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		80.000.000		2.161.400.000		2.210.000.000		2.210.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Balai Kebun Raya Baturraden	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan KRB ****	Unit	1	N/A	1	0	1	80.000.000	1	2.161.400.000	1	2.210.000.000	1	2.210.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		20.000.000		50.000.000		70.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Kelas B	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	20.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		20.000.000		241.400.000		260.000.000		280.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	20.000.000	1	241.400.000	1	260.000.000	1	280.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		270.000.000		280.000.000		440.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	0	1	270.000.000	1	280.000.000	1	440.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		20.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	20.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	800.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		20.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	0	1	20.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							*****															
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								546.200.000		538.000.000		611.640.000		644.000.000		686.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Balai Kebun Raya Baturraden	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun KRB ****	Laporan	1	1	1	546.200.000	1	538.000.000	1	611.640.000	1	644.000.000	1	686.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							85.200.000		90.000.000		95.000.000		99.000.000		105.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	85.200.000	1	90.000.000	1	95.000.000	1	99.000.000	1	105.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							460.000.000		425.000.000		482.640.000		500.000.000		525.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	460.000.000	1	425.000.000	1	482.640.000	1	500.000.000	1	525.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								120.000.000		225.000.000		1.780.000.000		2.050.000.000		2.340.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Balai Kebun Raya Baturraden	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan KRB ****	Unit	1	1	1	120.000.000	1	225.000.000	1	1.780.000.000	1	2.050.000.000	1	2.340.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							70.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	70.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							25.000.000		40.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	25.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							10.000.000		40.000.000		500.000.000		600.000.000		780.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	40.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	1	780.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							10.000.000		30.000.000		300.000.000		330.000.000		350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	30.000.000	1	300.000.000	1	330.000.000	1	350.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		20.000.000		800.000.000		900.000.000		950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	20.000.000	1	800.000.000	1	900.000.000	1	950.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM																		Dinas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									580.000.000		870.000.000		1.205.500.000		1.448.500.000		1.695.500.000	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BSPTH	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH ***	%	100	100	100	580.000.000	100	870.000.000	100	1.205.500.000	100	1.448.500.000	100	1.695.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								12.000.000		15.000.000		17.000.000		18.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di BSPTH	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah BSPTH ****	Dokumen	1	1	1	12.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							12.000.000		15.000.000		17.000.000		18.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	12.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								99.000.000		132.000.000		164.500.000		185.500.000		208.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di BSPTH	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BSPTH ****	%	100	100	100	99.000.000	100	132.000.000	100	164.500.000	100	185.500.000	100	208.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							13.000.000		12.000.000		14.000.000		15.000.000		17.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	13.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							7.000.000		8.500.000		9.500.000		10.500.000		11.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.000.000	1	8.500.000	1	9.500.000	1	10.500.000	1	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							7.000.000		12.000.000		14.000.000		15.000.000		17.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					A	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		4.500.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	0	1	4.500.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							15.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	15.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi							50.000.00		55.000.00		75.000.00		85.000.00		95.000.00	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					dan Konsultasi SKPD *****							0		0		0		0		0		Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		140.000.000		360.000.000		500.000.000		640.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di BSPTH	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan BSPTH ****	Unit	1	1	1	0	1	140.000.000	1	360.000.000	1	500.000.000	1	640.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						Kelas A
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	Unit	1	1	1	0	1	20.000.00	1	30.000.00	1	40.000.00	1	50.000.00	SUB BAGIAN	Dinas Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****							0		0		0		0	TATA USAHA	Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		20.000.000		200.000.000		300.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	20.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								384.000.000		433.000.000		459.000.000		485.000.000		511.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BSPTH	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BSPTH ****	Laporan	1	1	1	384.000.000	1	433.000.000	1	459.000.000	1	485.000.000	1	511.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					A	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							158.000.000		150.000.000		155.000.000		160.000.000		165.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	158.000.000	1	150.000.000	1	155.000.000	1	160.000.000	1	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum							225.000.0		260.000.0		270.000.0		280.000.0		290.000.0	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Kantor *****							00		00		00		00		00	Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	225.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	1	280.000.000	1	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								85.000.000		150.000.000		205.000.000		260.000.000		316.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BSPTH	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BSPTH ****	Unit	1	1	1	85.000.000	1	150.000.000	1	205.000.000	1	260.000.000	1	316.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																						Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							15.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							10.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		51.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							10.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN									437.000.000		685.000.000		724.000.000		743.000.000		793.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***																		Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK XI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11 ***	%	100	100	100	437.000.000	100	685.000.000	100	724.000.000	100	743.000.000	100	793.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di CDK XI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 11 ****	Dokumen	1	1	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								81.000.000		154.000.000		165.000.000		176.000.000		187.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di CDK XI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 11 ****	%	100	100	100	81.000.000	100	154.000.000	100	165.000.000	100	176.000.000	100	187.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							2.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							7.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	1	1	1	2.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN	Dinas Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan *****														TATA USAHA	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							5.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	5.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		109.000.000		132.000.000		135.000.000		169.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah unit barang milik daerah	Unit	1	1	1	0	1	109.000.0	1	132.000.0	1	135.000.0	1	169.000.0	SUB BAGIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK XI	penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 11 ****					00		00		00		00		00	TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		30.000.000		40.000.000		30.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	0	1	30.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							*****															WILAYAH XI
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								216.000.000		242.000.000		242.000.000		242.000.000		242.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK XI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 11 ****	Laporan	1	1	1	216.000.000	1	242.000.000	1	242.000.000	1	242.000.000	1	242.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							35.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	35.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							180.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	180.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								95.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK XI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 ****	Unit	1	1	1	95.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1	1	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****																- CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili	Unit	1	1	1	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							tasi *****															XI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									464.000.000		773.000.000		901.000.000		973.000.000		1.076.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7 ***	%	100	100	100	464.000.000	100	773.000.000	100	901.000.000	100	973.000.000	100	1.076.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								3.000.000		5.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di CDK VII	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 7 ****	Dokumen	1	1	1	3.000.000	1	5.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							3.000.000		5.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	3.000.000	1	5.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								75.000.000		126.000.000		143.000.000		160.000.000		177.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah di wilayah CDK VII	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 7 ****	%	100	100	100	75.000.000	100	126.000.000	100	143.000.000	100	160.000.000	100	177.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							3.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							5.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							5.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							5.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	5.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					VII	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								0		109.000.000		132.000.000		135.000.000		169.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK VII	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 7 ****	Unit	1	1	1	0	1	109.000.000	1	132.000.000	1	135.000.000	1	169.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		30.000.000		40.000.000		30.000.000		50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	30.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	1	0	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								276.000.000		374.000.000		436.000.000		473.000.000		510.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK VII	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 7 ****	Laporan	1	1	1	276.000.000	1	374.000.000	1	436.000.000	1	473.000.000	1	510.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	1	1	1	1.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN	Dinas Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Surat Menyurat	Surat Menyurat *****														TATA USAHA	Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							50.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	0	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							225.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	225.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	375.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								110.000.000		159.000.000		183.000.000		197.000.000		211.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di CDK VII	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 7 ****	Unit	1	1	1	110.000.000	1	159.000.000	1	183.000.000	1	197.000.000	1	211.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						85.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	1	85.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****						5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						10.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya	Jumlah Gedung	Unit	1	1	1		1		1		1		1		SUB	Dinas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****					10.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000	BAGIAN TATA USAHA	Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan (IKU) *												2.540.000.000		3.070.000.000		26.880.000.000		29.450.000.000		33.003.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
							Indeks Kualitas Udara (IKU) *	Angka	87,73	84,91	84,93		84,94		84,96		84,98		84,99		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemar											2.540.000.000		3.070.000.000		26.880.000.000		29.450.000.000		33.003.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	an udara **																				Kehutanan	
							Indeks NO2 SO2 **	Angka	0,32	0,324	0,323	2.540.000.000	0,323	3.070.000.000	0,323	26.880.000.000	0,322	29.450.000.000	0,322	33.003.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ***									870.000.000		1.200.000.000		1.900.000.000		2.100.000.000		2.353.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Menurunnya emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	Penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan ***	%	2,04	2,64	3,26	870.000.000	29,09	1.200.000.000	28,59	1.900.000.000	28,29	2.100.000.000	28,23	2.353.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup ****								870.000.000		1.200.000.000		1.900.000.000		2.100.000.000		2.353.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Lingkungan Hidup	
						Menurunnya emisi GRK	Jumlah lokasi yang melakukan aksi penurunan emisi ditingkat tapak ****	Lokasi	100	100	100	870.000.000	100	1.200.000.000	100	1.900.000.000	100	2.100.000.000	100	2.353.000.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim *****							70.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		453.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan *****	Dokumen	1	1	1	70.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	453.000.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH
		2.11.03.1.01.0006			Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan *****							800.000.000		1.000.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan	1	1	1	800.000.000	1	1.000.000.000	1	1.700.000.000	1	1.800.000.000	1	1.900.000.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim *****															
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT ***									930.000.000		1.270.000.000		1.330.000.000		1.600.000.000		1.850.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
						Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya ***	%	100	100	100	930.000.000	100	1.270.000.000	100	1.330.000.000	100	1.600.000.000	100	1.850.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		2.11.08.1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi ****								930.000.000		1.270.000.000		1.330.000.000		1.600.000.000		1.850.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
						Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup ****	Unit	282	125	125	930.000.000	125	1.270.000.000	125	1.330.000.000	125	1.600.000.000	125	1.850.000.000	Pokja Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup	
		2.11.08.1.01.0003			Penyelengaraan Penyuluhan dan							50.000.00		165.000.0		200.000.0		300.000.0		300.000.0	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi *****							0		00		00		00		00	Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
						Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat *****	Orang	400	400	400	50.000.000	400	165.000.000	400	200.000.000	400	300.000.000	400	300.000.000	Pokja Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH
		2.11.08.1.01.0005			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat *****							400.000.000		455.000.000		480.000.000		600.000.000		700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
						Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH *****	Lembaga	3	3	3	400.000.000	3	455.000.000	3	480.000.000	3	600.000.000	3	700.000.000	Pokja Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH
		2.11.08.1.01.0007			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup *****							480.000.000		650.000.000		650.000.000		700.000.000		850.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan *****	Dokumen	282	125	125	480.000.000	125	650.000.000	125	650.000.000	125	700.000.000	125	850.000.000	Pokja Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN ***									740.000.000		600.000.000		23.650.000.000		25.750.000.000		28.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Timbulan sampah yang terkelola ***	%	60,27	62	63	740.000.000	64	600.000.000	65	23.650.000.000	66	25.750.000.000	67	28.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.11.1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional ****								740.000.000		600.000.000		23.650.000.000		25.750.000.000		28.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun,	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Tertanganinya sampah di TPA/ TPST Regional	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah ****	%	21	22	23	740.000.000	24	600.000.000	26	23.650.000.000	28	25.750.000.000	30	28.800.000.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	
		2.11.11.1.01.0003			Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional *****							0		0		23.000.000.000		25.000.000.000		28.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	23.000.000.000	1	25.000.000.000	1	28.000.000.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	JAWA TENGAH
		2.11.11.1.01.0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional *****							440.000.000		375.000.000		400.000.000		475.000.000		500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Terlaksananya	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1		Pokja	JAWA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan *****					440.000.000		375.000.000		400.000.000		475.000.000		500.000.000	Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	TENGAH
		2.11.11.1.01.0014			Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota *****							300.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota *****	Dokumen	1	1	1	300.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan (IKA) *												3.445.000.000		4.363.280.000		5.945.000.000		7.515.000.000		9.877.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
							Indiks Kualitas Air (IKA) *	Angka	52,03	68,71	68,82		68,92		69,02		69,13		69,23		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemar											3.445.000.000		4.363.280.000		5.945.000.000		7.515.000.000		9.877.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	an air permukaan **																				Kehutanan	
							Indeks Pencemaran Air **	Angka	3,35	3,35	3,34	3.445.000.000	3,34	4.363.280.000	3,33	5.945.000.000	3,33	7.515.000.000	3,32	9.877.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP ***									660.000.000		800.000.000		1.120.000.000		1.415.000.000		1.702.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
						Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase dokumen perencanaanLingkungan Hidup yang tersedia ***	%	100	100	100	660.000.000	100	800.000.000	100	1.120.000.000	100	1.415.000.000	100	1.702.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi ****								410.000.000		500.000.000		620.000.000		735.000.000		880.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
						Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup ****	Dokumen	4	4	4	410.000.000	4	500.000.000	4	620.000.000	4	735.000.000	4	880.000.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	
		2.11.02.1.01.0002			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi *****							300.000.000		350.000.000		400.000.000		480.000.000		620.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					Kapasitas Lingkungan Hidup	
						Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi *****	Dokumen	4	3	8	300.000.000	7	350.000.000	7	400.000.000	7	480.000.000	7	620.000.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH
		2.11.02.1.01.0006			Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi *****							110.000.000		150.000.000		220.000.000		255.000.000		260.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
						RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	110.000.000	N/A	150.000.000	N/A	220.000.000	1	255.000.000	N/A	260.000.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH
		2.11.02.1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi ****								250.000.000		300.000.000		500.000.000		680.000.000		822.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
						Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi ****	Dokumen	94	10	10	250.000.000	10	300.000.000	35	500.000.000	35	680.000.000	10	822.000.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	
		2.11.02.1.02.0002			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD *****							0		0		200.000.000		200.000.000		202.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
						Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	200.000.000	N/A	200.000.000	N/A	202.000.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Disusun *****															
		2.11.02.1.02.0009			Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota *****							250.000.000		300.000.000		300.000.000		480.000.000		620.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
						Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota *****	Dokumen	94	10	10	250.000.000	10	300.000.000	35	300.000.000	35	480.000.000	10	620.000.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ***									1.550.000.000		2.000.000.000		2.800.000.000		3.500.000.000		5.025.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Meningkatnya pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan hidup	Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup ***	%	100	100	100	1.550.000.000	100	2.000.000.000	100	2.800.000.000	100	3.500.000.000	100	5.025.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
		2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup ****								1.550.000.000		2.000.000.000		2.800.000.000		3.500.000.000		5.025.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terselenggaranya pemantauan kualitas lingkungan hidup	Jumlah titik /sampel pada lokasi pemantauan kualitas	sampel	335	320	360	1.200.000.000	365	1.500.000.000	370	2.000.000.000	375	2.500.000.000	380	3.750.000.000	Pokja Pengujian Kualitas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							lingkungan hidup ****														Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01.0009			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut *****							1.200.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		3.750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) *****	Lokasi	46	46	46	1.200.000.000	46	1.500.000.000	46	2.000.000.000	46	2.500.000.000	46	3.750.000.000	Pokja Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A JAWA TENGAH
						Terselenggaranya akreditasi parameter kualitas lingkungan	Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan ****	Dokumen	78	72	70	350.000.000	72	500.000.000	74	800.000.000	76	1.000.000.000	78	1.275.000.000	Pokja Pengendalian Mutu dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	
		2.11.03.1.01.0015			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi *****							350.000.000		500.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.275.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
						Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan *****	Dokumen	2	2	2	350.000.000	2	500.000.000	2	800.000.000	2	1.000.000.000	2	1.275.000.000	Pokja Pengendalian Mutu dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A JAWA TENGAH
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN									400.000.000		468.280.000		470.000.000		600.000.000		750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ***																		Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya ***	%	4,76	4,76	4,76	400.000.000	4,76	468.280.000	4,76	470.000.000	4,76	600.000.000	4,76	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup ****								400.000.000		468.280.000		470.000.000		600.000.000		750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu ****	Usaha/Kegiatan	107	109	111	400.000.000	113	468.280.000	115	470.000.000	117	600.000.000	120	750.000.000	Pokja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.11.03.1.01.0010			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut *****							400.000.000		468.280.000		470.000.000		600.000.000		750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan *****	Kegiatan	N/A	3	3	400.000.000	3	468.280.000	3	470.000.000	3	600.000.000	3	750.000.000	Pokja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) ***									35.000.000		45.000.000		55.000.000		250.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola ***	%	80	80	80	35.000.000	80	45.000.000	80	55.000.000	80	250.000.000	80	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalia	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																					n Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.05.1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****								35.000.000		45.000.000		55.000.000		250.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Terselenggaranya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola ****	Ton	1476440	1476440	1476440	35.000.000	1476440	45.000.000	1476440	55.000.000	1476440	250.000.000	1476440	300.000.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	
		2.11.05.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan *****							35.000.000		45.000.000		55.000.000		250.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,	Dokumen	1	1	1	35.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya *****															
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) ***									300.000.000		550.000.000		550.000.000		600.000.000		700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
						Meningkatnya pembinaan terhadap persetujuan lingkungan	Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan ***	%	100	100	100	300.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		2.11.06.1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ****								300.000.000		550.000.000		550.000.000		600.000.000		700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
						Terselenggaranya	Jumlah	Dokumen	10	10	10		10		10		10		10		Pokja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan ****					300.000.000		550.000.000		550.000.000		600.000.000		700.000.000	Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup	
		2.11.06.1.01.0001			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH *****							300.000.000		550.000.000		550.000.000		600.000.000		700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
						Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan 0perasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan *****	Dokumen	10	10	10	300.000.000	10	550.000.000	10	550.000.000	10	600.000.000	10	700.000.000	Pokja Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup	JAWA TENGAH
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) ***									330.000.000		300.000.000		550.000.000		650.000.000		750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
						Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan ***	%	50	50	50	330.000.000	50	300.000.000	50	550.000.000	50	650.000.000	50	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
		2.11.06.1.01		Pembinaan dan								330.000.0		300.000.0		550.000.0		650.000.0		750.000.0	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ****								00		00		00		00		00	Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha berizin yang taat ****	Pelaku Usaha	21	15	35	330.000.000	35	300.000.000	35	550.000.000	35	650.000.000	35	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
		2.11.06.1.01.0009			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *****							330.000.000		300.000.000		550.000.000		650.000.000		750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
						Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi *****	Usaha/Kegiatan	36	30	65	330.000.000	65	300.000.000	65	550.000.000	65	650.000.000	65	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	JAWA TENGAH
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP ***									170.000.000		200.000.000		400.000.000		500.000.000		650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Meningkatnya penyelesaian aduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti ***	%	100	100	100	170.000.000	100	200.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
		2.11.10.1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi ****								170.000.000		200.000.000		400.000.000		500.000.000		650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
						Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah laporan aduan yang ditangani ****	Pengaduan	22	15	25	170.000.000	25	200.000.000	25	400.000.000	25	500.000.000	25	650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
		2.11.10.1.01.0009			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi *****							170.000.000		200.000.000		400.000.000		500.000.000		650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	
						Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani *****	Pengaduan	22	15	30	170.000.000	30	200.000.000	30	400.000.000	30	500.000.000	30	650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	JAWA TENGAH

Tabel 4.2

Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target /Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai (mangrove)	Rehabilitasi mangrove	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	1. Program Pengelolaan Hutan Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	1. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam 2. CDK Wilayah Pesisir (CDK I, II, III, IV, V, VI, VIII, dan XI)	1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2. Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota (Wilayah Pesisir)
2.	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas,perempuan, anak, ekonomi kreatif dan sport center)	Sosialisasi/Bimtek pengelolaan persampahan	Jumlah kegiatan sosialisasi/bimtek pengelolaan persampahan yang dilaksanakan	1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	1. Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target /Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
3.	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau	Penerbitan Persetujuan Lingkungan; Pengawasan diterbitkan oleh pemerintah provinsi; Penanganan, pengaduan lingkungan hidup; penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup; Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan; Fasilitasi Pengembangan Unit Usaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu - Sektor Kehutanan; Pembinaan Kepatuhan Regulasi Unit Usaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Jumlah Rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah dan emisi Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH b. Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi a. Sub Kegiatan Pengelolaan	1. Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan 4. Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target /Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat d. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kegiatan Pengumpulan Limbah		

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target /Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut b. Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut c. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 5. Program Pengelolaan Hutan		

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target /Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi d. Sub Kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan		

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target /Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				menengah yang menjadi kewenangan provinsi Sub Kegiatan Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi		
4.	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung Potensi Ekonomi Sungai lainnya	Rehabilitasi hutan dan lahan meliputi pembangunan hutan rakyat dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, ekonomi produktif	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	1. Program Pengelolaan Hutan Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara a. Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara b. Sub Kegiatan Pembangunan Sumur resapan c. Sub Kegiatan Pembangunan Gully Plug d. Sub Kegiatan Pembangunan Dam Penahan 2. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam 2. CDK Wilayah III, VI, VII, VII, X, dan XI	1. Kementerian Kehutanan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target /Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS b. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS c. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah d. Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS		
5.	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Fasilitasi penanganan RTH di perkotaan dan Penghijauan lingkungan di luar Kawasan hutan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi a. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Program Pengelolaan Hutan Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara b. Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup 2. CDK Wilayah I-XI	1. Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target /Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
6.	Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi	Pelatihan dan fasilitasi pengolahan sampah di lingkungan pesantren	Jumlah kegiatan sosialisasi/bimtek pengolahan sampah di lingkungan pesantren	1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	1. Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota 2. Kementerian Agama
7.	Pendidikan Perubahan Iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren	Pendampingan program kampung iklim, pendampingan Gerakan peduli lingkungan	Jumlah kegiatan sosialisasi/bimtek fasilitasi Pendidikan perubahan iklim dilingkungan sekolah/pesantre	1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	1. Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota 2. Dinas Pendidikan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target /Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
			n	untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi a. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		
8.	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (MPA), Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Fasilitasi sarpras penanganan Karhutlah, koordinasi penanganan gangguan ancaman hutan	Jumlah kegiatan sosialisasi/bimtek pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan	1. Program Pengelolaan Hutan Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1. Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan 2. CDK Wilayah I-XI	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan (pengolahan) sampah regional	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat meliputi: sosialisasi/pelatihan pengelolaan sampah dan fasilitasi sarpras kepada masyarakat,	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan	1. Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional a. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan	1. Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota Terkait

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target /Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
		gerakan desa mandiri sampah, program kampung iklim, fasilitasi TPS3R. Pengembangan tempat pengolahan sampah regional meliputi: Pembangunan dan operasional TPST Regional	Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional c. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Kerusakan Lingkungan Hidup	
10.	Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sosial	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) Pendampingan kelompok perhutanan sosial Fasilitasi sarpras ekonomi produktif Bantuan Bibit Produktif	Jumlah kelompok tani hutan yang didampingi	1. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan a. Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan b. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan 2. Program Pengelolaan Hutan Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan	1. Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan 2. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. CDK Wilayah I-XI	1. Kementerian Kehutanan 2. Dinas Pertanian dan Perkebunan 3. Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target /Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Hutan Negara a. Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		
11.	Pengembangan Destinasi wisata alam, budaya, dan religi berdasarkan potensi wilayah	Pengelolaan Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I Pengelolaan Kebun Raya Baturraden	Jumlah unit tahura dan kebun raya yang dikelola	1. Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi a. Sub Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi b. Sub Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi c. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi d. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan TAHURA e. Sub Kegiatan Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi f. Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi g. Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1. Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A 2. Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	1. Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target /Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi a. Sub kegiatan: pengelolaan kebun raya kewenangan provinsi		
12.	Penyediaan benih yang berkualitas	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan Sertifikasi Sumber benih, Mutu Benih, Mutu Bibit	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang diproduksi dan didistribusikan	1. Pengelolaan Hutan Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan a. Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih b. Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih c. Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit d. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit e. Sub Kegiatan Pembangunan Sumber Benih f. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan g. Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	1. Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	1. Kementerian Kehutanan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target /Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
13.	Menghadirkan infrastruktur yang *carbon neutral*	Penyiapan Peraturan Daerah terkait dengan *Carbon neutral* dan pemberian insentif kepada daerah yang menggunakan Carbon neutral dalam Pembangunan Infrastruktur	Jumlah dokumen terkait *carbon neural* yang disusun	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi a. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	1. Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Sekretariat Daerah 2. DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	86,35	87,73	84,91	84,93	84,94	84,96	84,98	84,99	
2.	Indiks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,23	52,03	68,71	68,82	68,92	69,02	69,13	69,23	
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	46,34	48,37	59,46	59,47	59,48	59,49	59,5	59,51	
4.	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kehutanan	%	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	
5.	Kualitas udara pada konsentrasi SO2 dan NO2	Angka	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	
6.	Kualitas Air Permukaan pada Parameter BOD	mg/l	9.23	6.35	9.00	8.90	8.80	8.70	8.60	8.50	
7.	Luas tutupan lahan	Ha	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	
8.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	N/A	N/A	0,473	0,478	0,484	0,491	0,498	0,506	
9.	Pertumbuhan produksi hasil hutan	%	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	86,35	87,73	84,91	84,93	84,94	84,96	84,98	84,99	
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,23	52,03	68,71	68,82	68,92	69,02	69,13	69,23	
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	46,34	48,37	59,46	59,47	59,48	59,49	59,5	59,51	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 serta didasarkan pada hasil evaluasi pencapaian kinerja periode sebelumnya dan proyeksi tantangan strategis yang akan dihadapi.

Renstra ini dirancang secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki komitmen dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan dokumen ini mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Jawa Tengah.

Tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen ini mencerminkan arah capaian kinerja yang harus diupayakan secara konsisten oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dalam implementasinya, pencapaian target Renstra ini menuntut sinergi dan koordinasi yang erat, tidak hanya di lingkup internal pemerintah provinsi, tetapi juga bersama instansi pusat, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, BUMN, akademisi, dan masyarakat.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2025–2029. Pemahaman dan komitmen seluruh jajaran DLHK terhadap isi dokumen ini menjadi kunci dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan di Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Lampiran: Pohon Kinerja

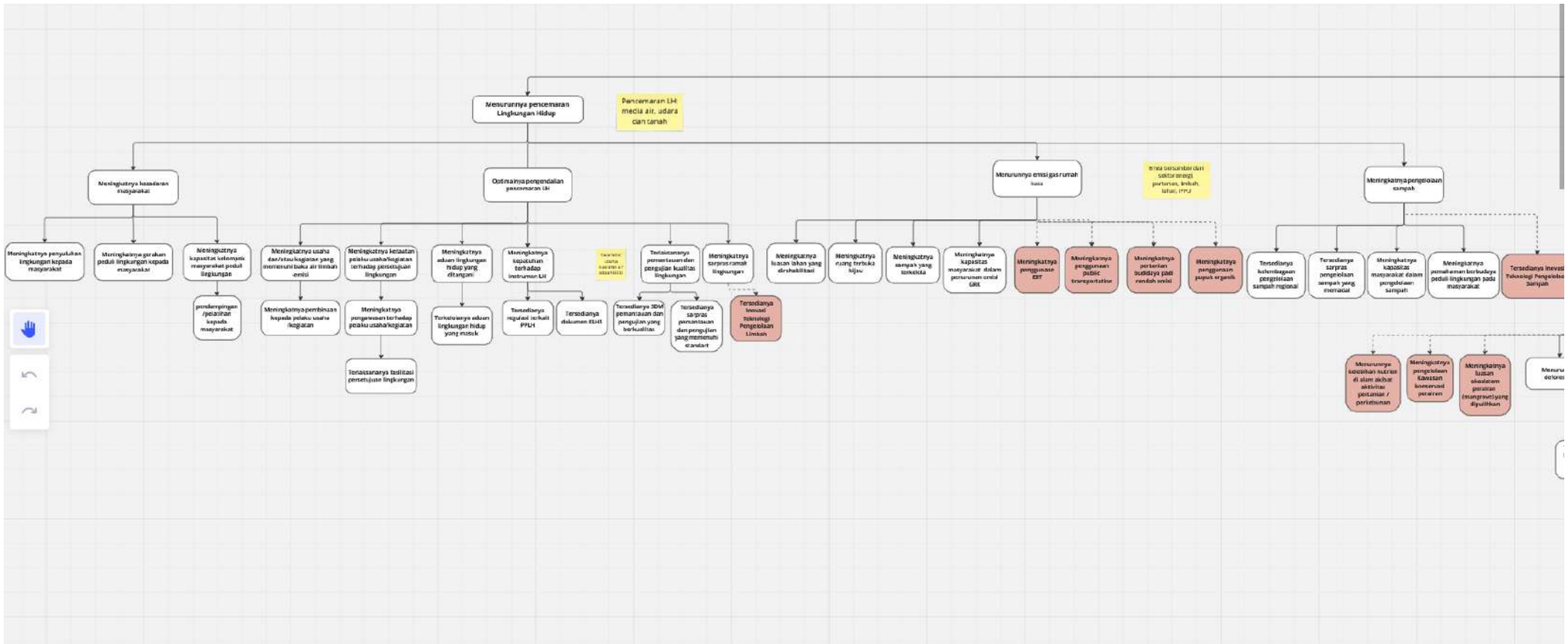

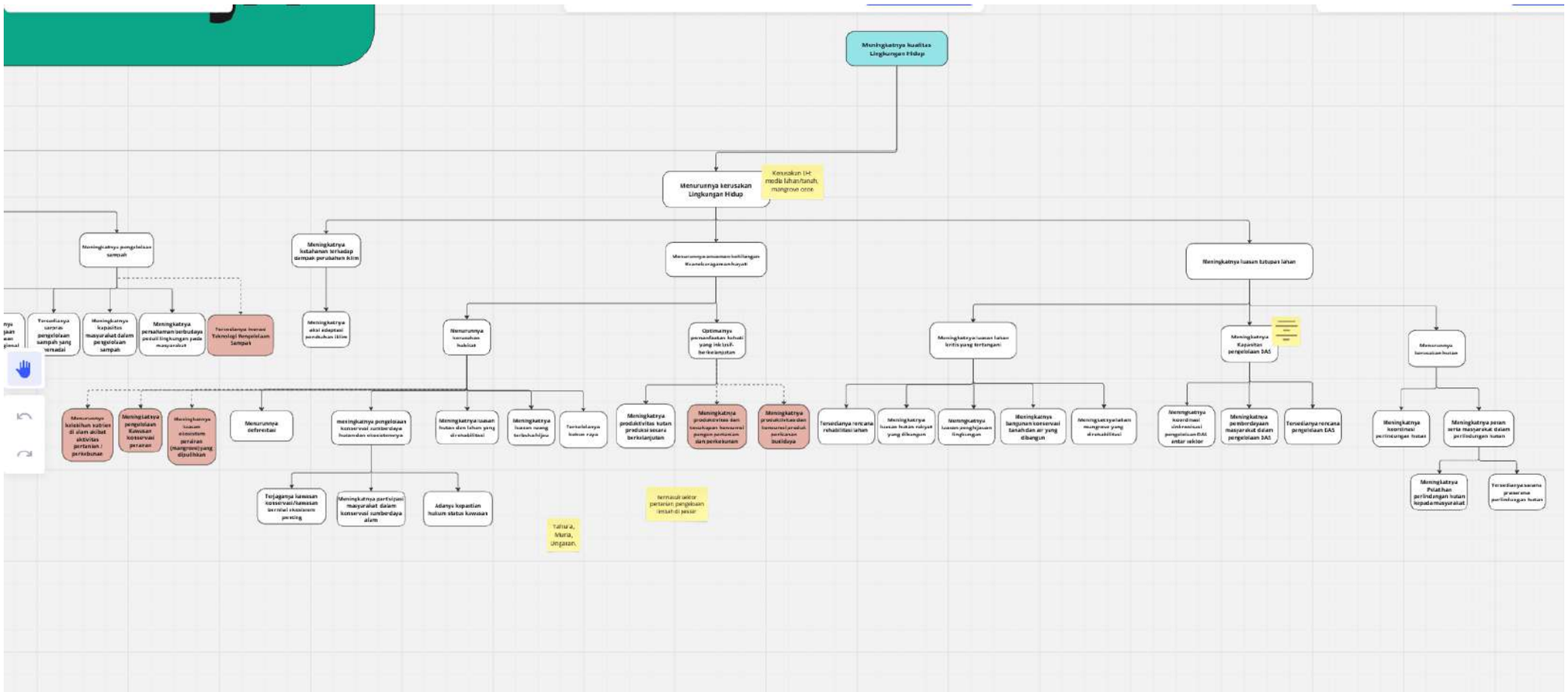
Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup
Menurunnya kerusakan Lingkungan Hidup
Kerusakan LH: media lahan/tanah, mangrove crce
Meningkatnya pengelolaan sampah
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah
Meningkatnya pemahaman terbudaya perduli lingkungan pada masyarakat
Tersedianya Inovasi Teknologi Pengelolaan Sampah
Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim
Meningkatnya aksi adaptasi perubahan iklim
Menurunnya keanekaragaman hayati
Menurunnya kerusakan habitat
Optimalnya pemanfaatan kawasan yang inklusif-berkelanjutan
Meningkatnya luasan tutupan lahan
Meningkatnya luasan lahan kritis yang tertangani
Meningkatnya Kapasitas pengelolaan DAS
Menurunnya kerusakan hutan
Menurunnya kelestarian habitat di alam akibat aktivitas pertanian / perkebunan
Meningkatnya pengelolaan Kawasan konservasi perairan
Meningkatnya luasan ekosistem perairan (mangrove) yang dipulihkan
Menurunnya deforestasi
meningkatnya pengelolaan konservasi sumberdaya hutandan ekosistemnya
Meningkatnya luasan hutan dan lahan yang direhabilitasi
Meningkatnya luasan ruang terbuhahijau
Terkelolanya kawasan raya
Meningkatnya produktivitas hutan produksi secara berkelanjutan
Meningkatnya produktivitas dan kesukupan konservasi pengan pemanfaatan dan perkebunan
Meningkatnya produktivitasdan konservasi produk perikanan budidaya
Tersedianya rencana rehabilitasi lahan
Meningkatnya luasan hutan rakyat yang dibangun
Meningkatnya luasan penghijauan lingkungan
Meningkatnya bangunan konservasi tanahdan air yang dibangun
Meningkatnya luas kawasan mangrove yang direhabilitasi
Meningkatnya koordinasi sinkronisasi pengelolaan DAS antar sektor
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS
Tersedianya rencana pengelolaan DAS
Meningkatnya koordinasi perlindungan hutan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan
Meningkatnya Pelatihan perlindungan hutan kepadamasyarakat
Tersedianya sarana prasarana perlindungan hutan
Terjaganya kawasan konservasi/kawasan bernilai ekosistem penting
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam konservasi sumberdaya alam
Adanya kepastian hukum status kawasan
Tahura, Mera, Ungaran.
termasuk sektor pertanian pengelolaan limbah di pasar

Cascading Sekretariat

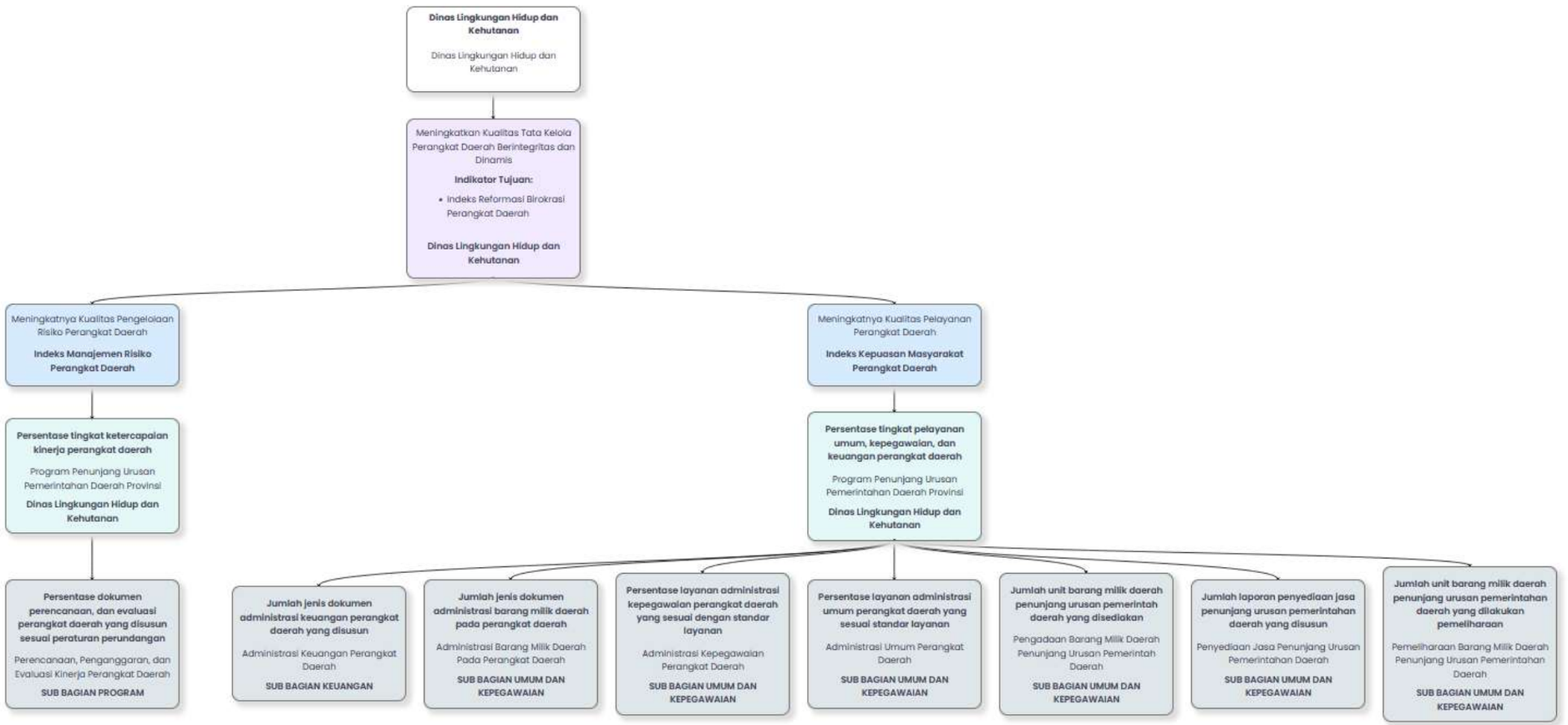

Cascade Bidang 1

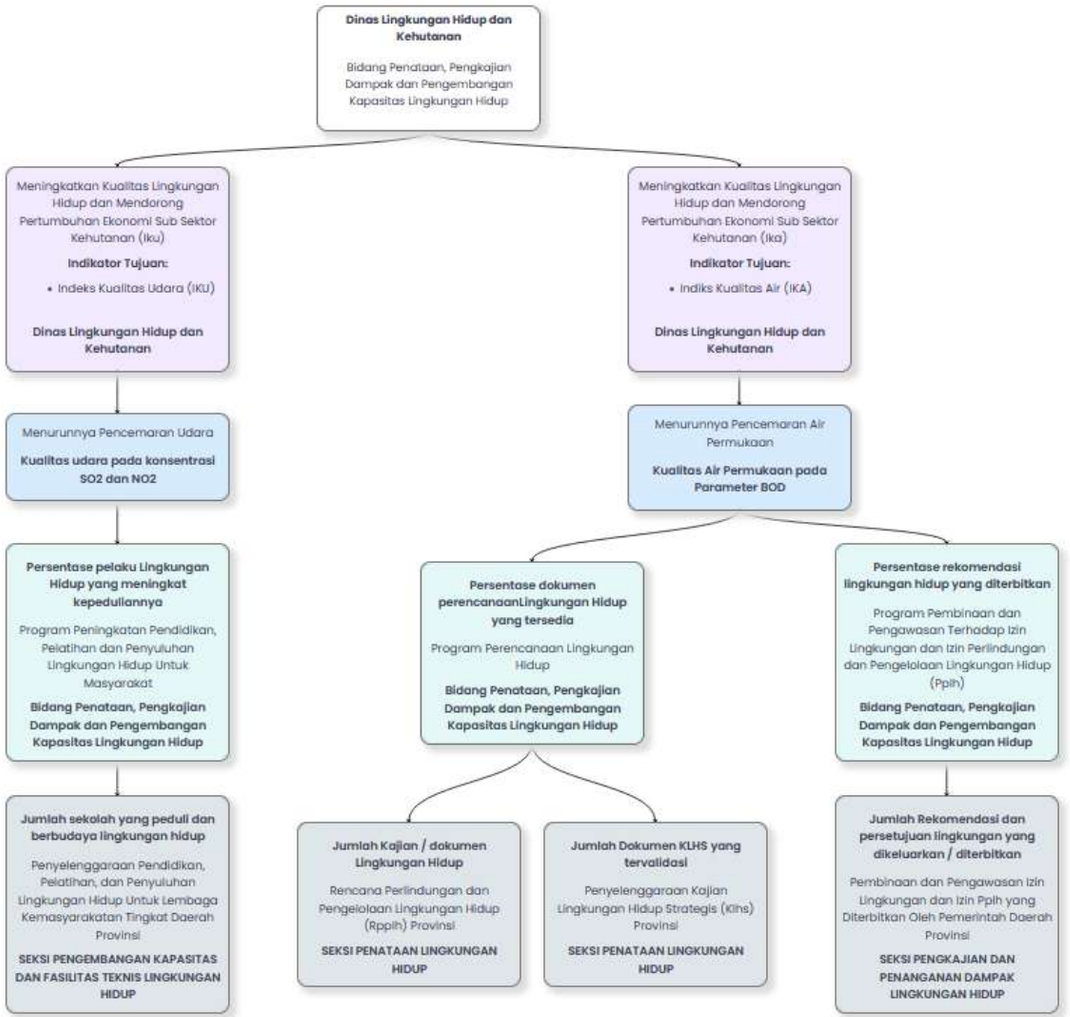

Cascading Bidang 2

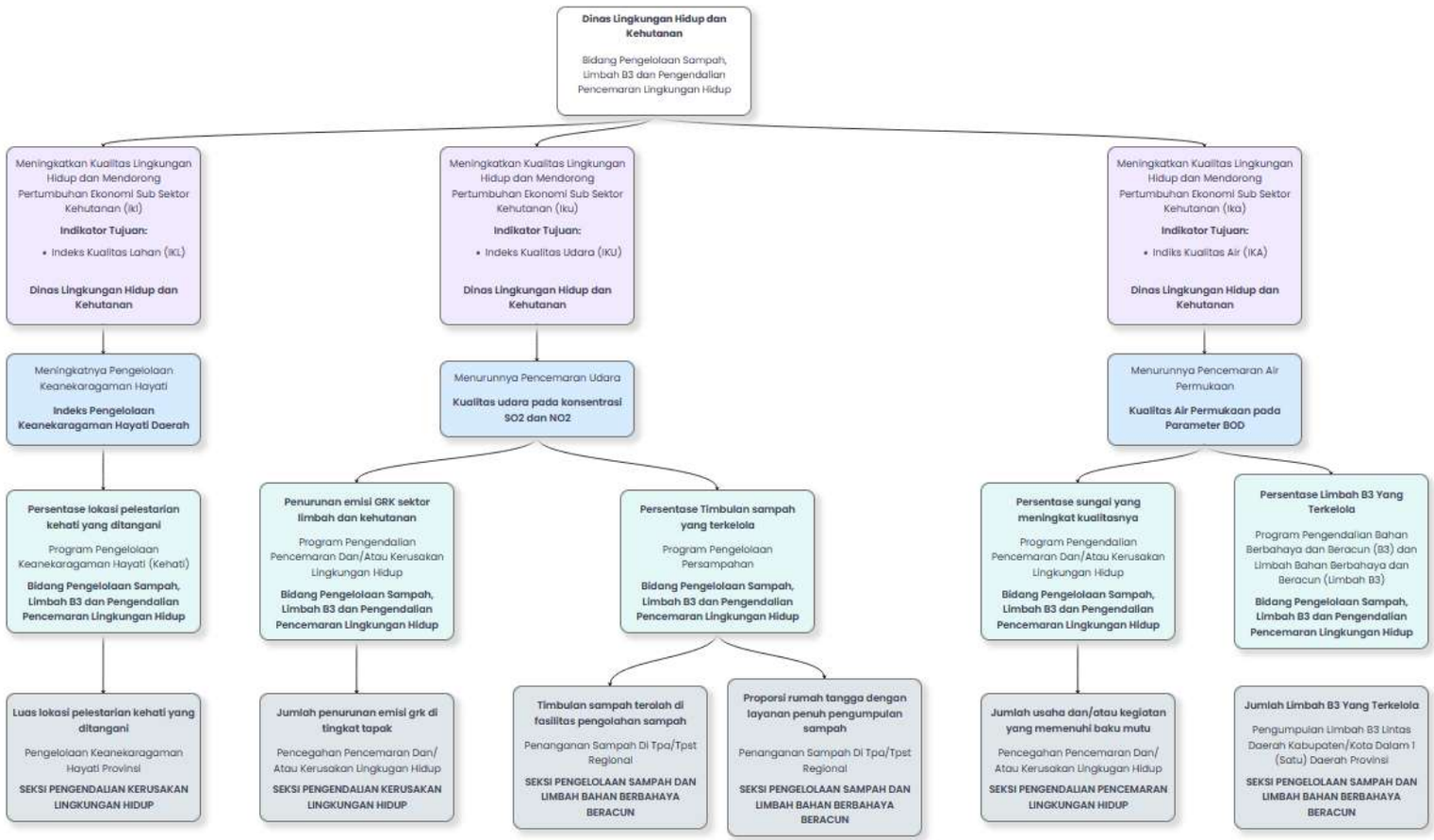

Cascading Bidang 3

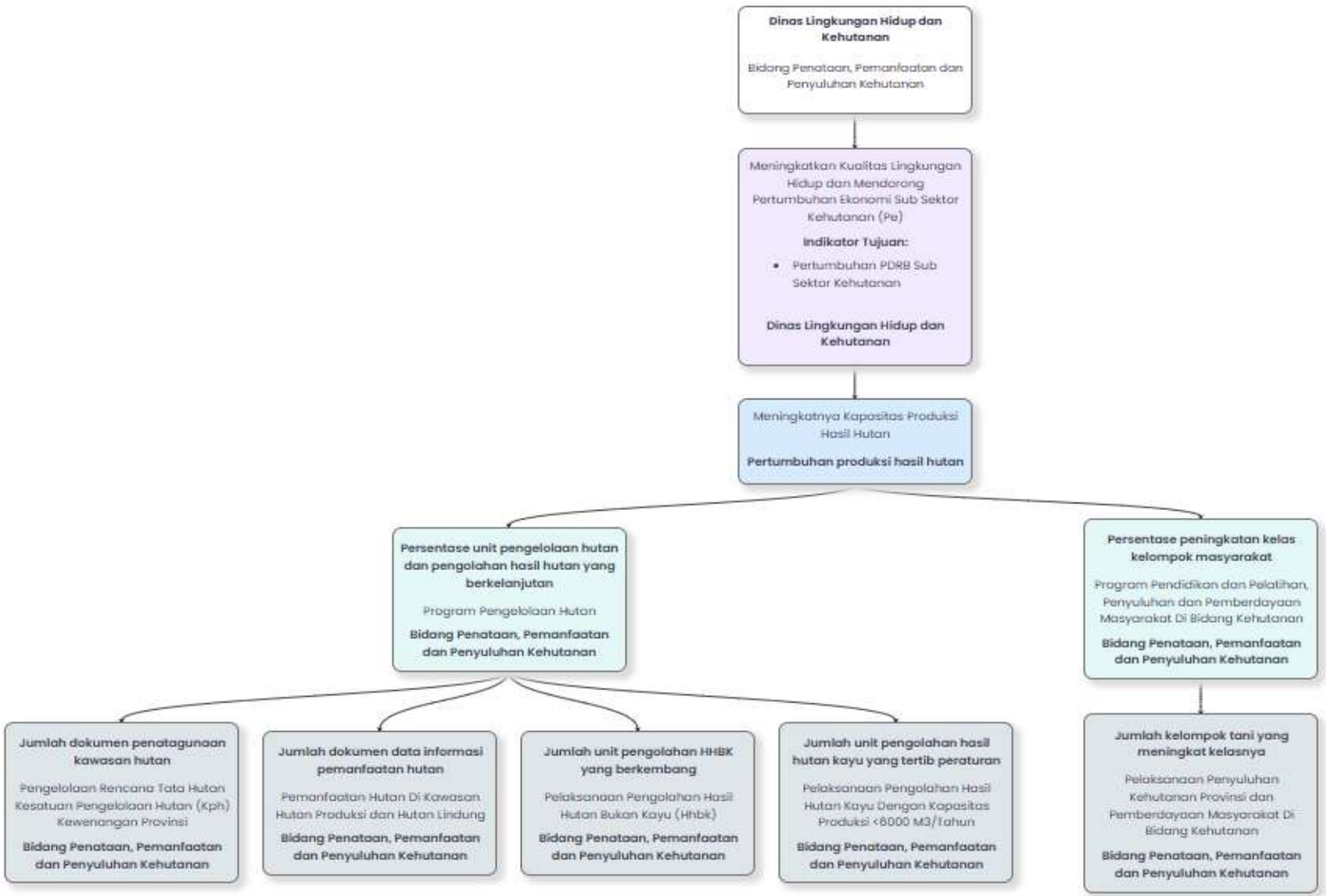

Cascading Bidang 4

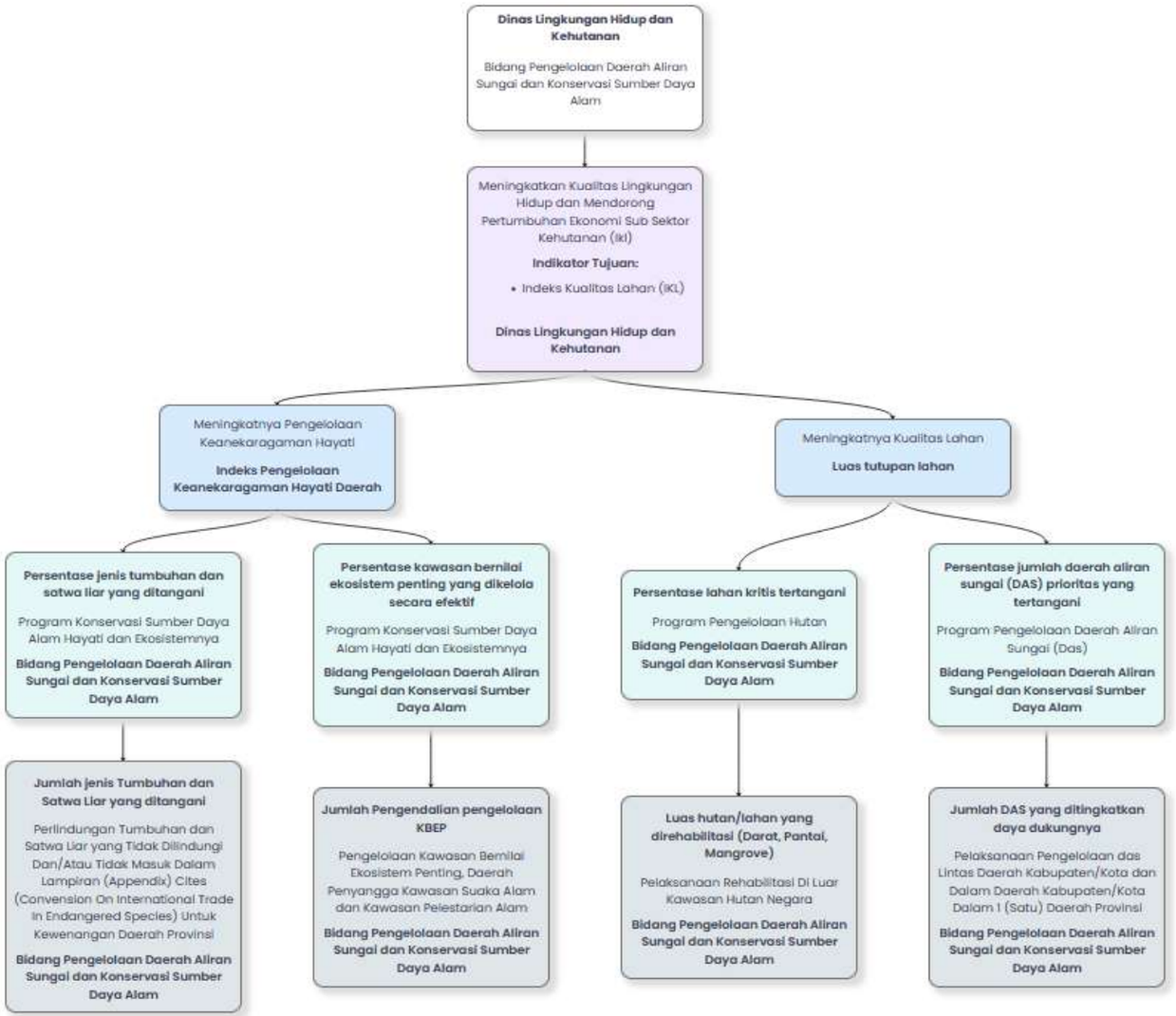

Bidang 5

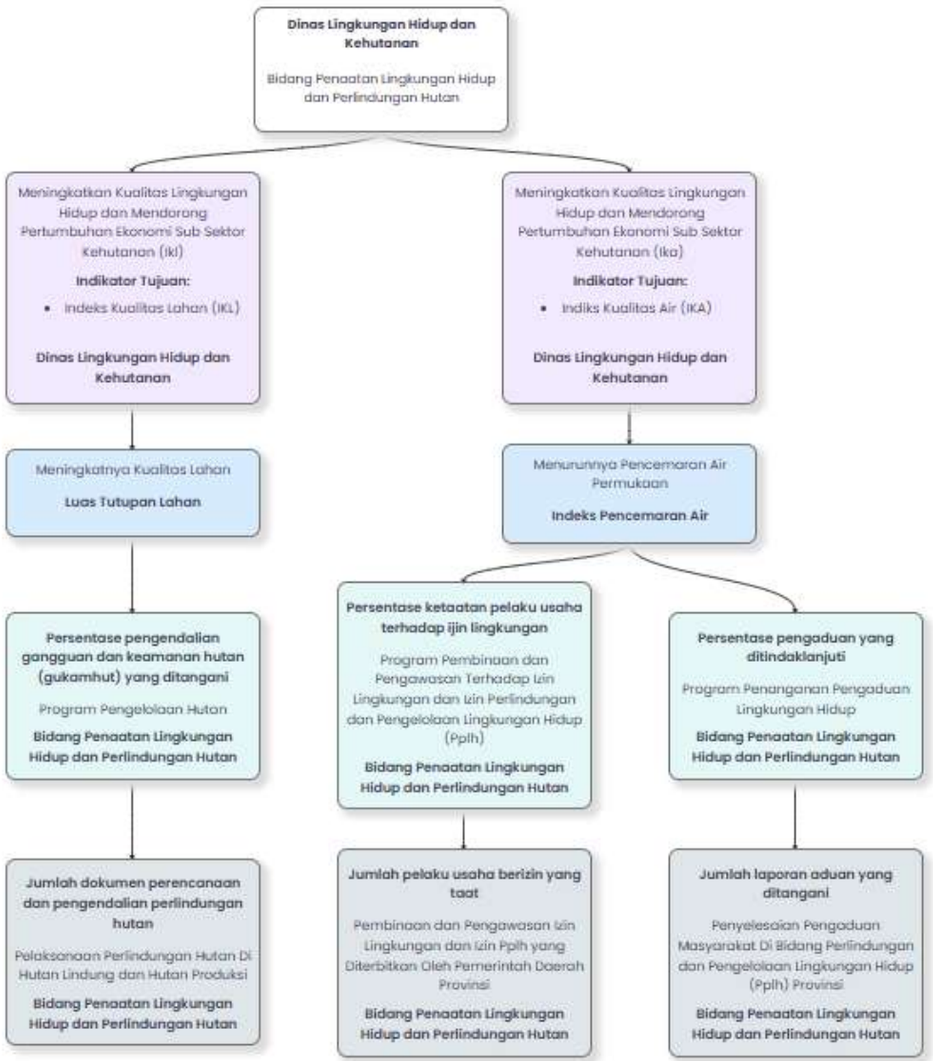
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan (Ikl)
Indikator Tujuan:
Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan (Ika)
Indikator Tujuan:
Indiks Kualitas Air (IKA)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatnya Kualitas Lahan
Luas Tutupan Lahan
Menurunnya Pencemaran Air Permukaan
Indeks Pencemaran Air
Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani
Program Pengelolaan Hutan
Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
Jumlah pelaku usaha berizin yang taat
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Pplh yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
Jumlah laporan aduan yang ditangani
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Provinsi
Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan

Cascading BPL2H

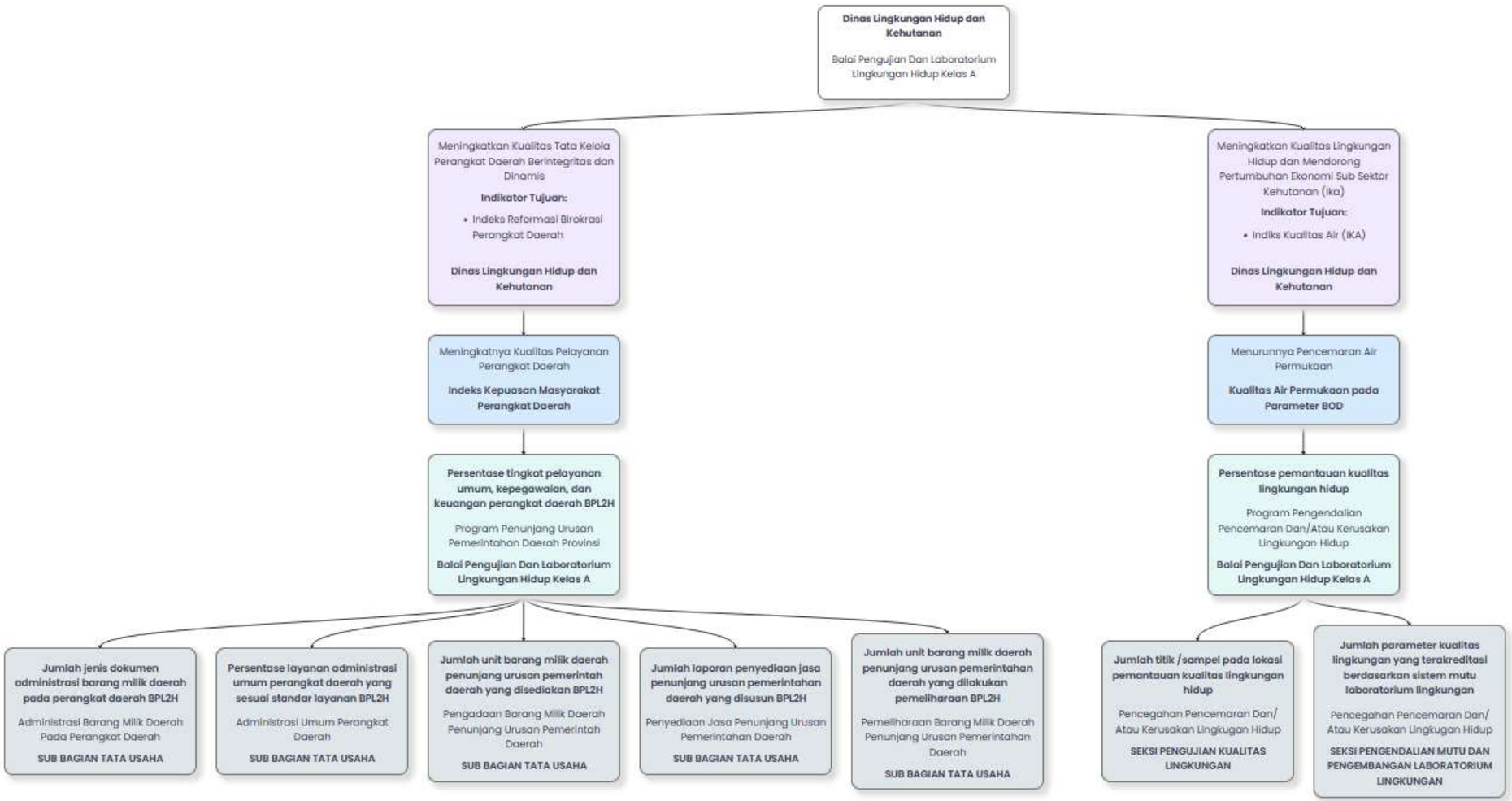

Cascading Tahura

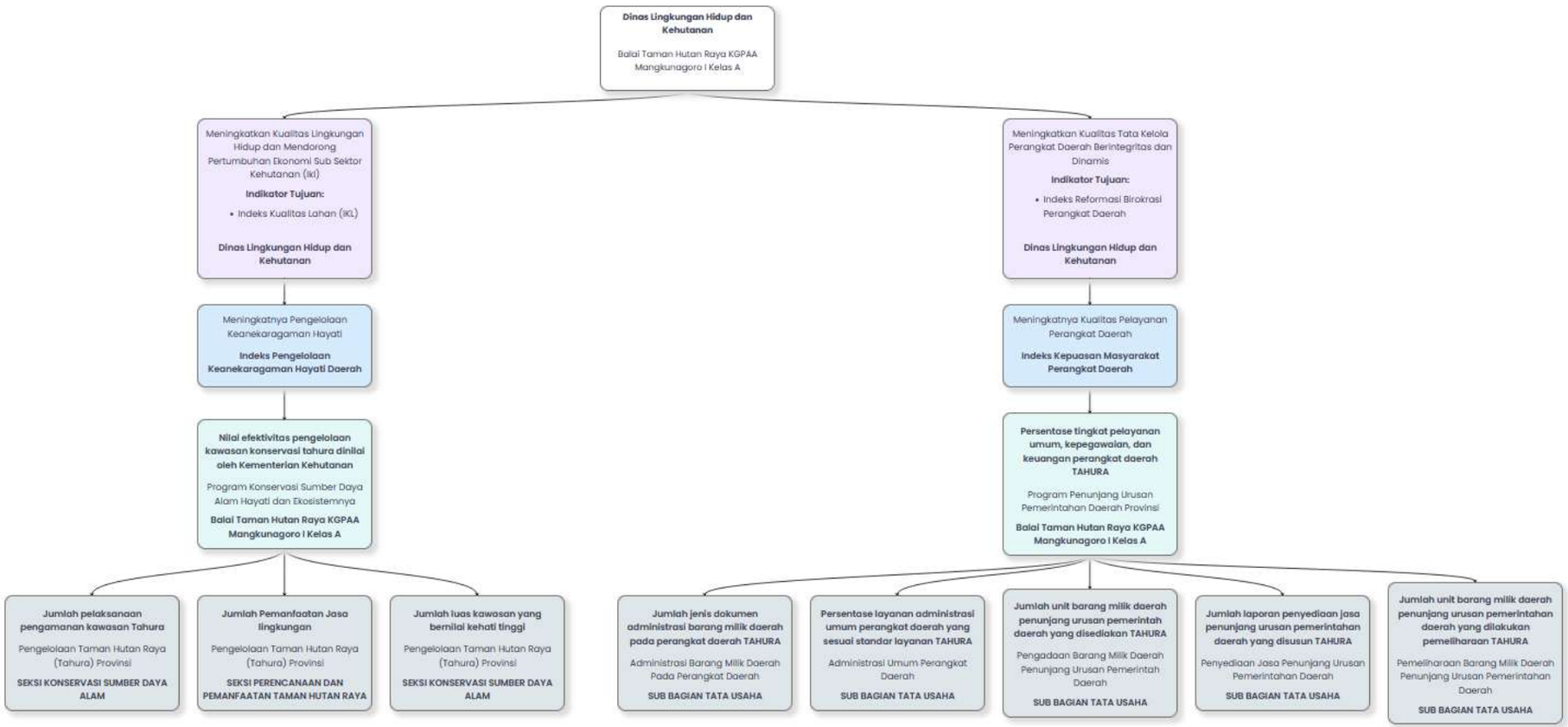

Cascading KRB

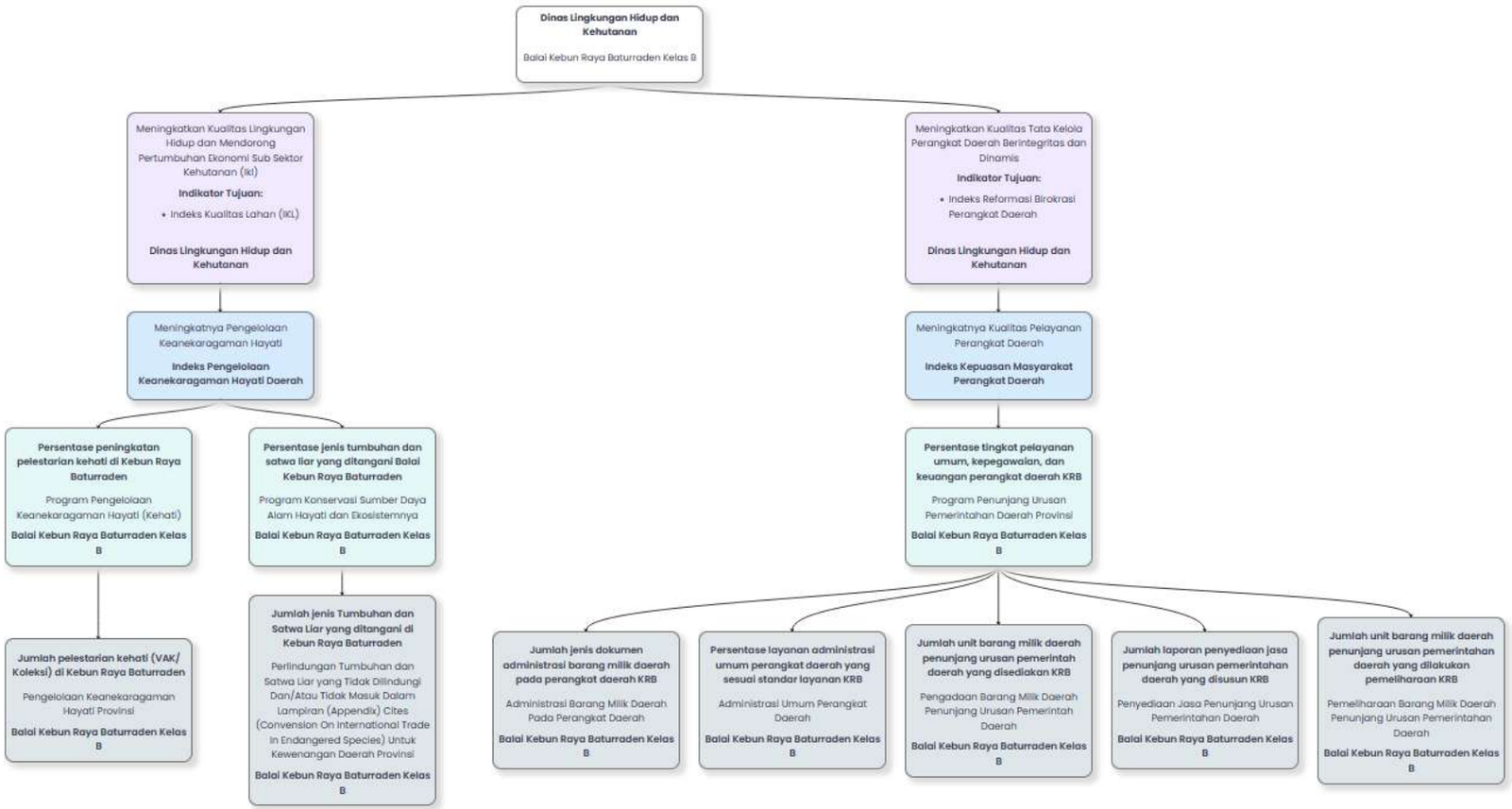

Cascading BSPTH

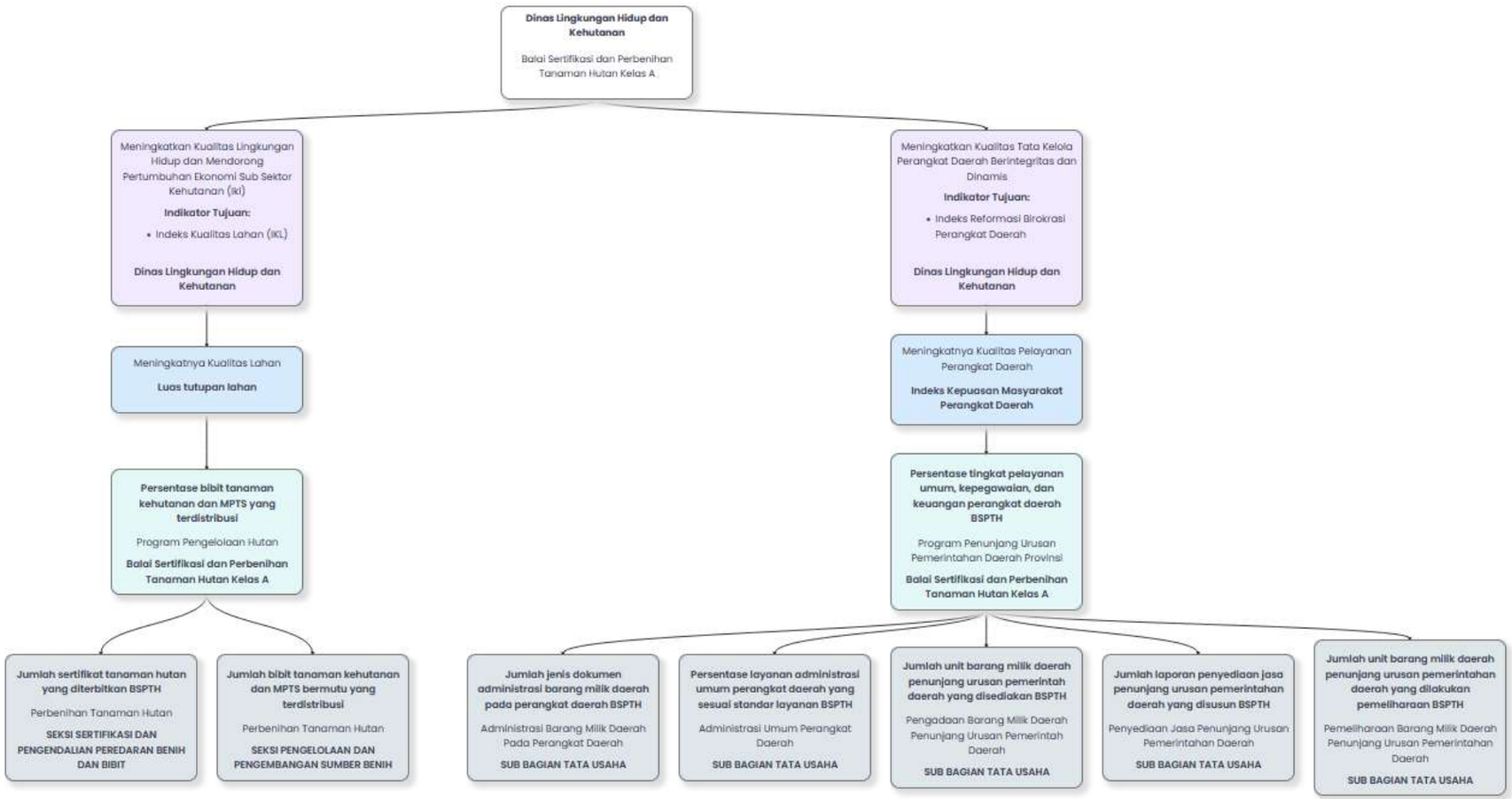

Cascading CDK 1

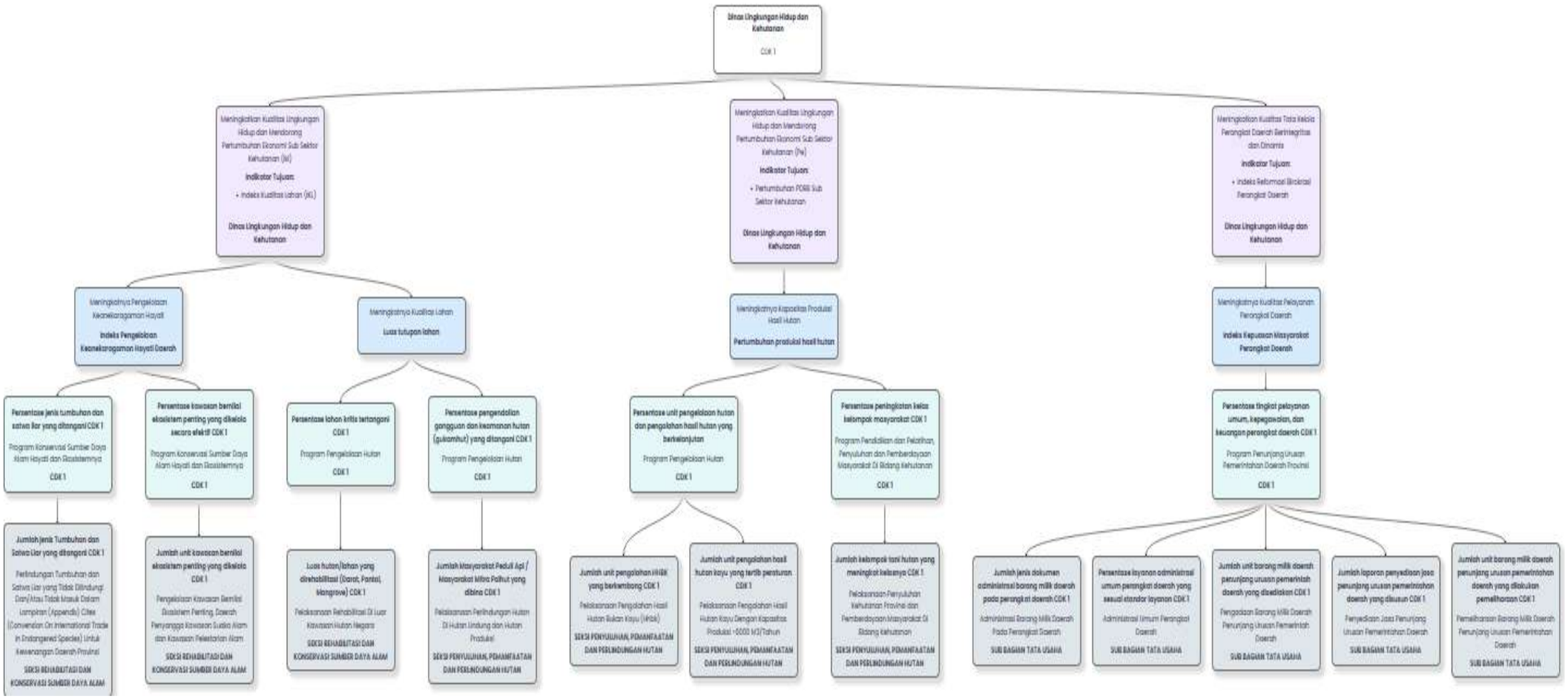

Cascading CDK 2

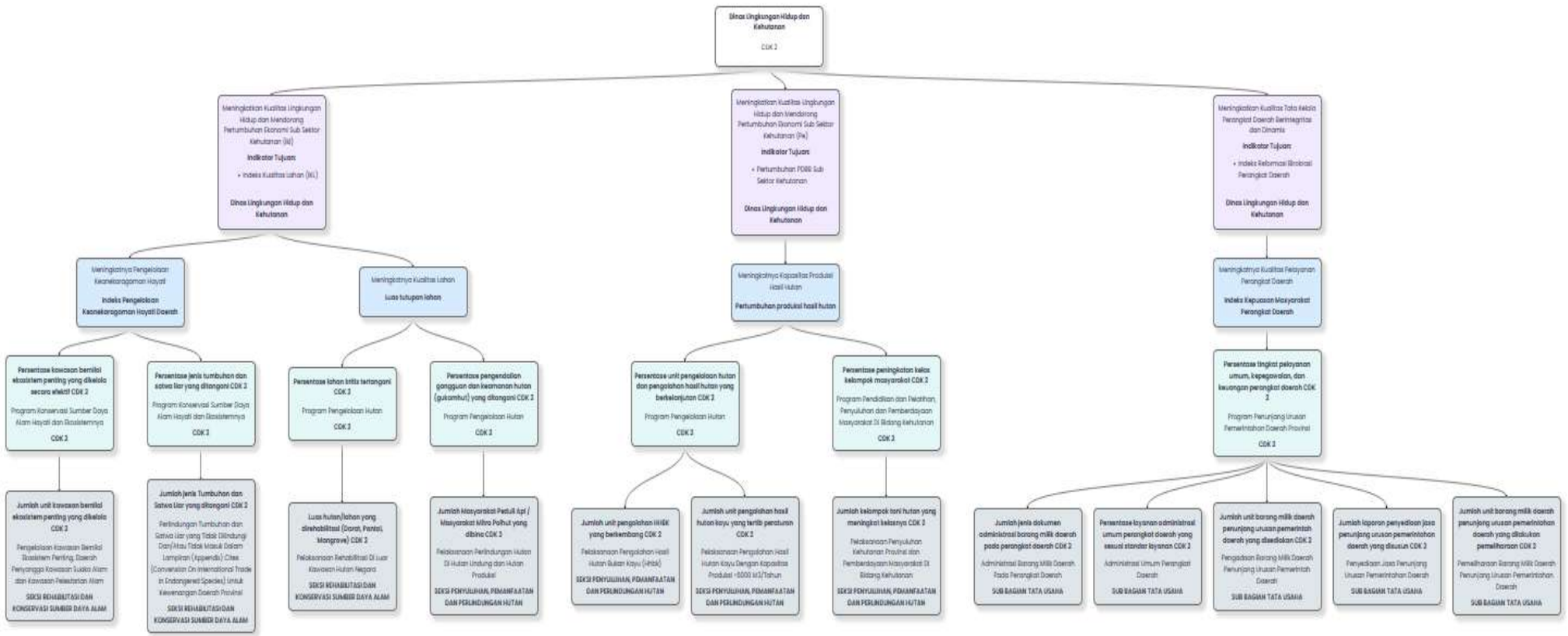

Cascading CDK 3

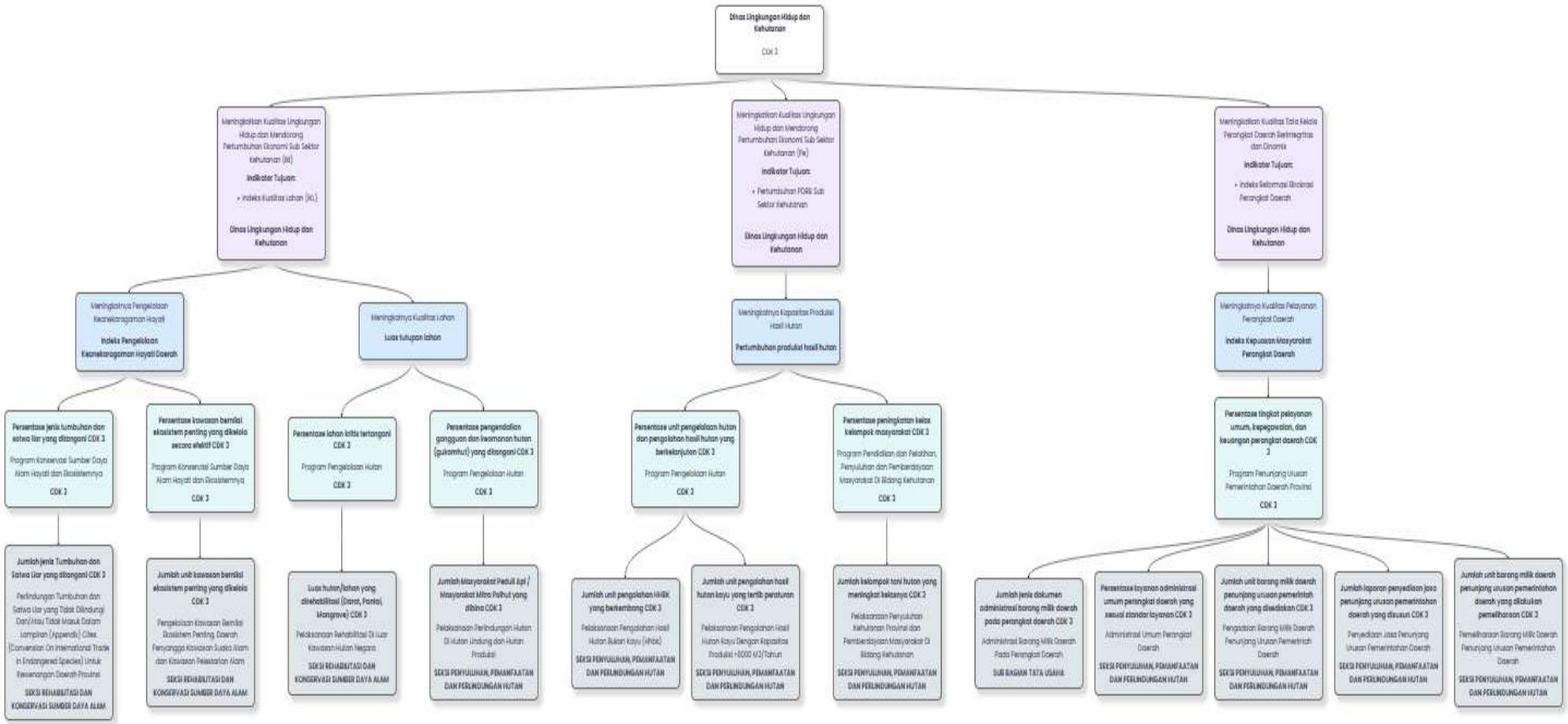

Cascading CDK 4

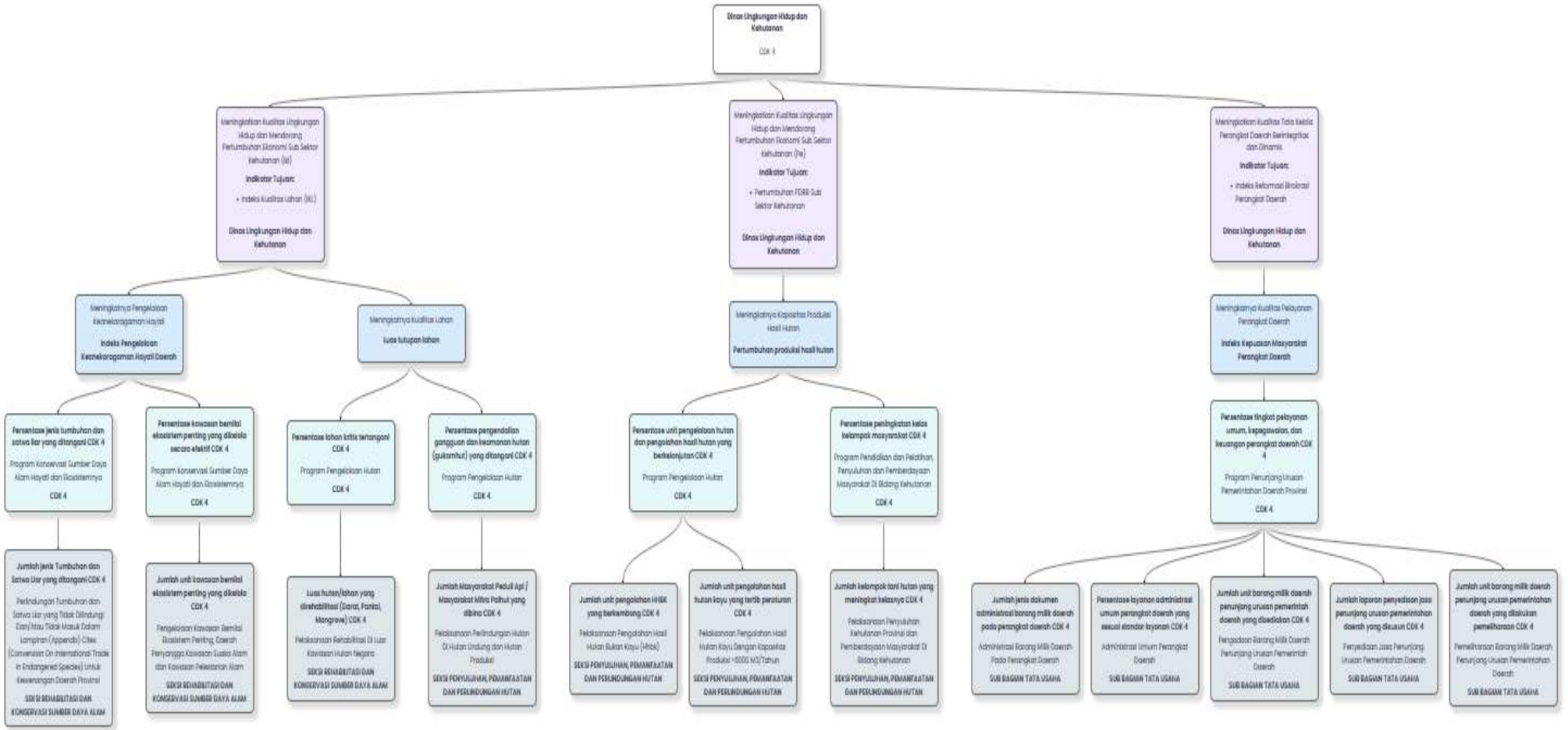

Cascading CDK 5

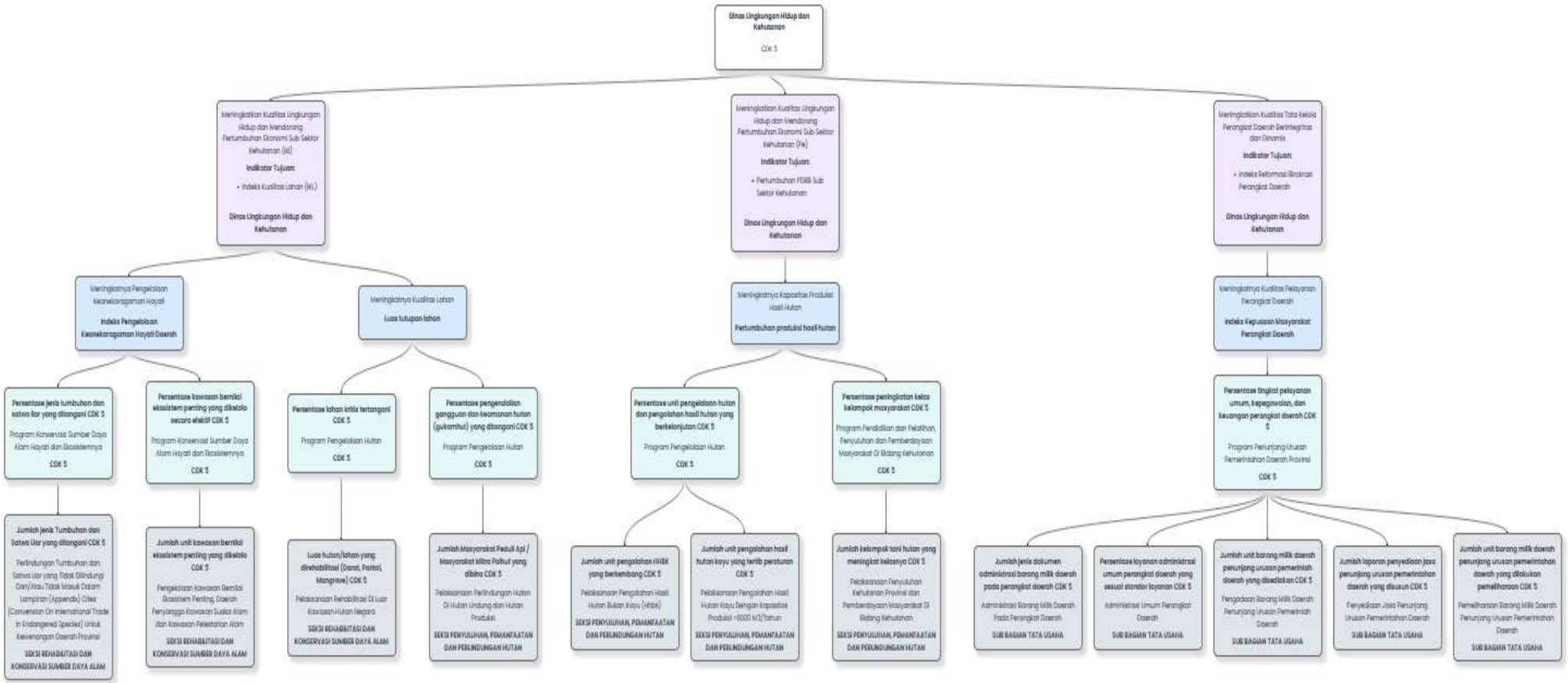

Cascading CDK 6

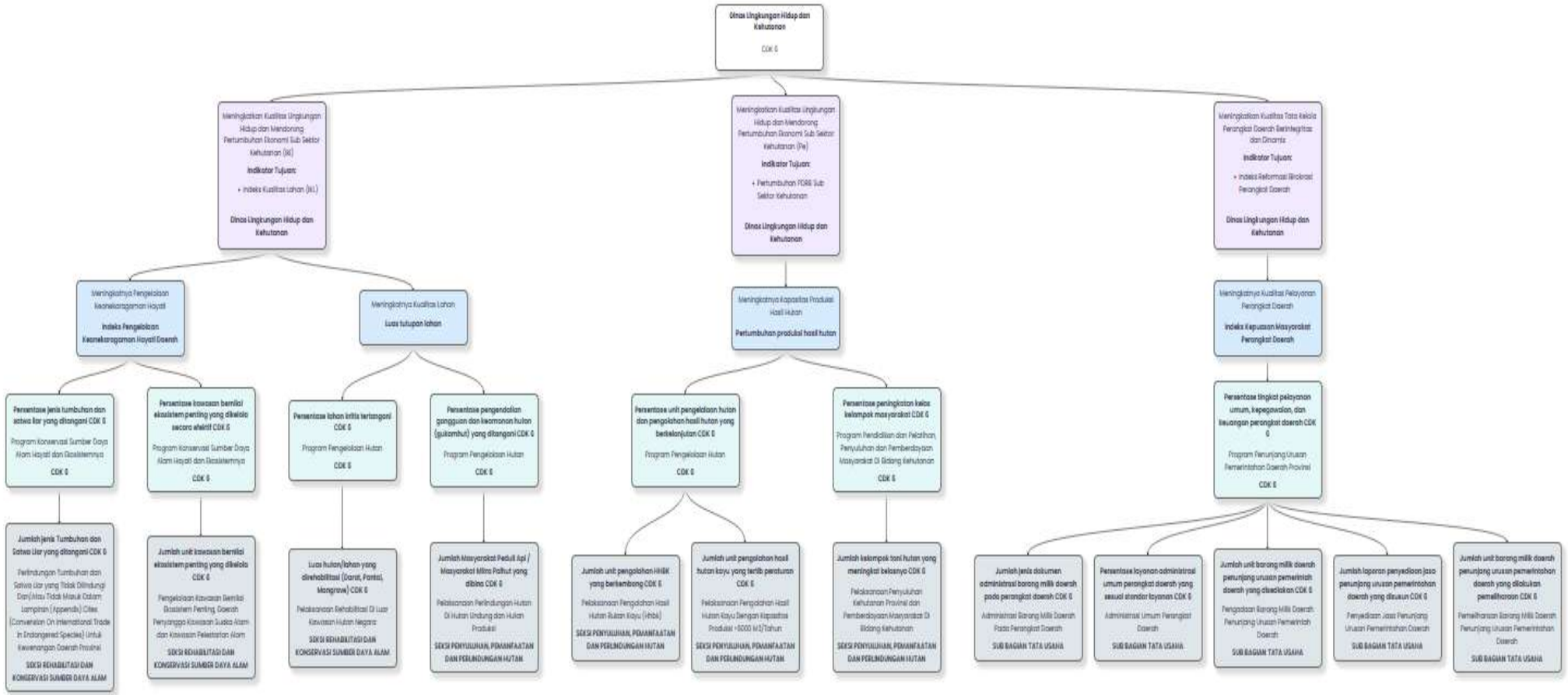

Cascading CDK 7

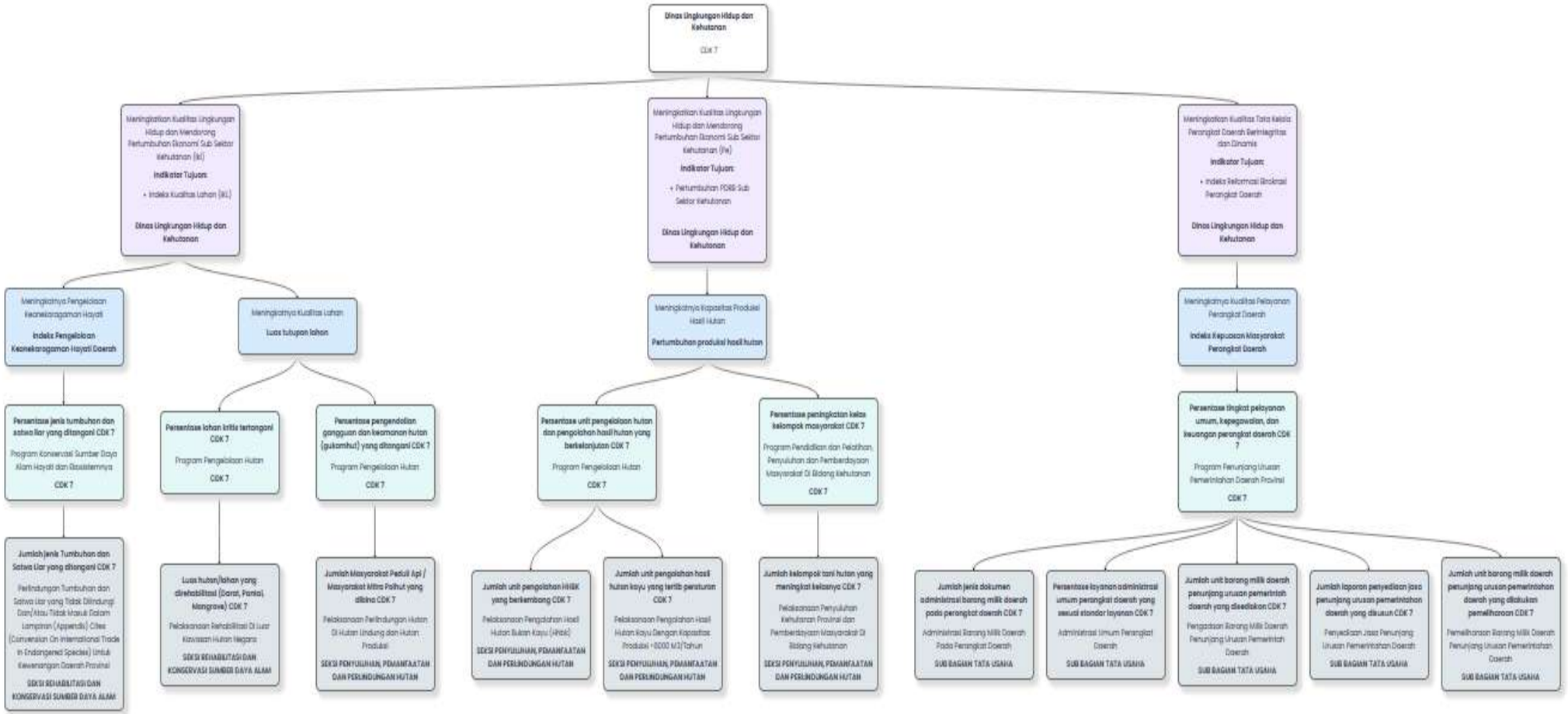

Cascading CDK 8

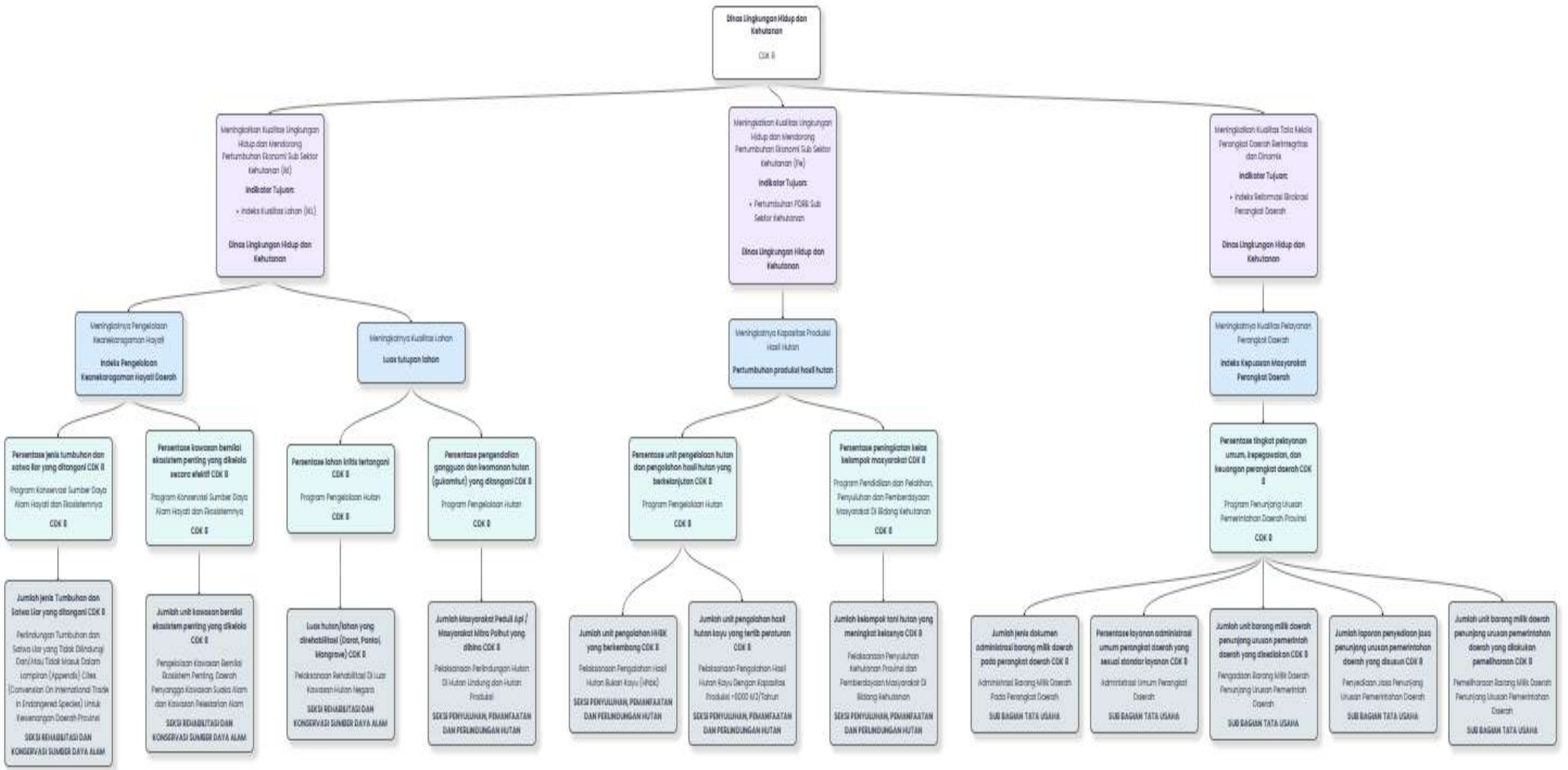

Cacading CDK 9

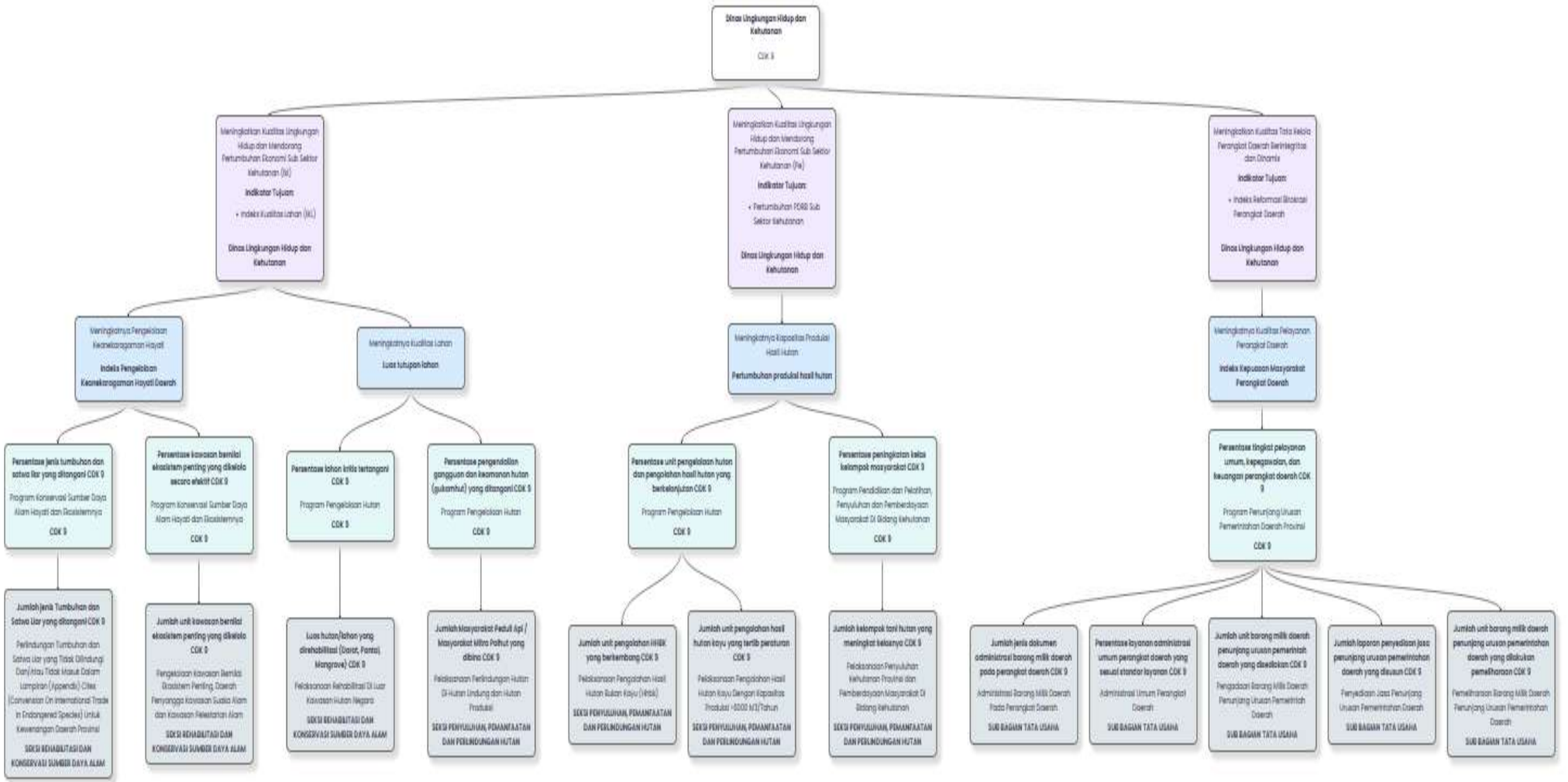

Cascading CDK 10

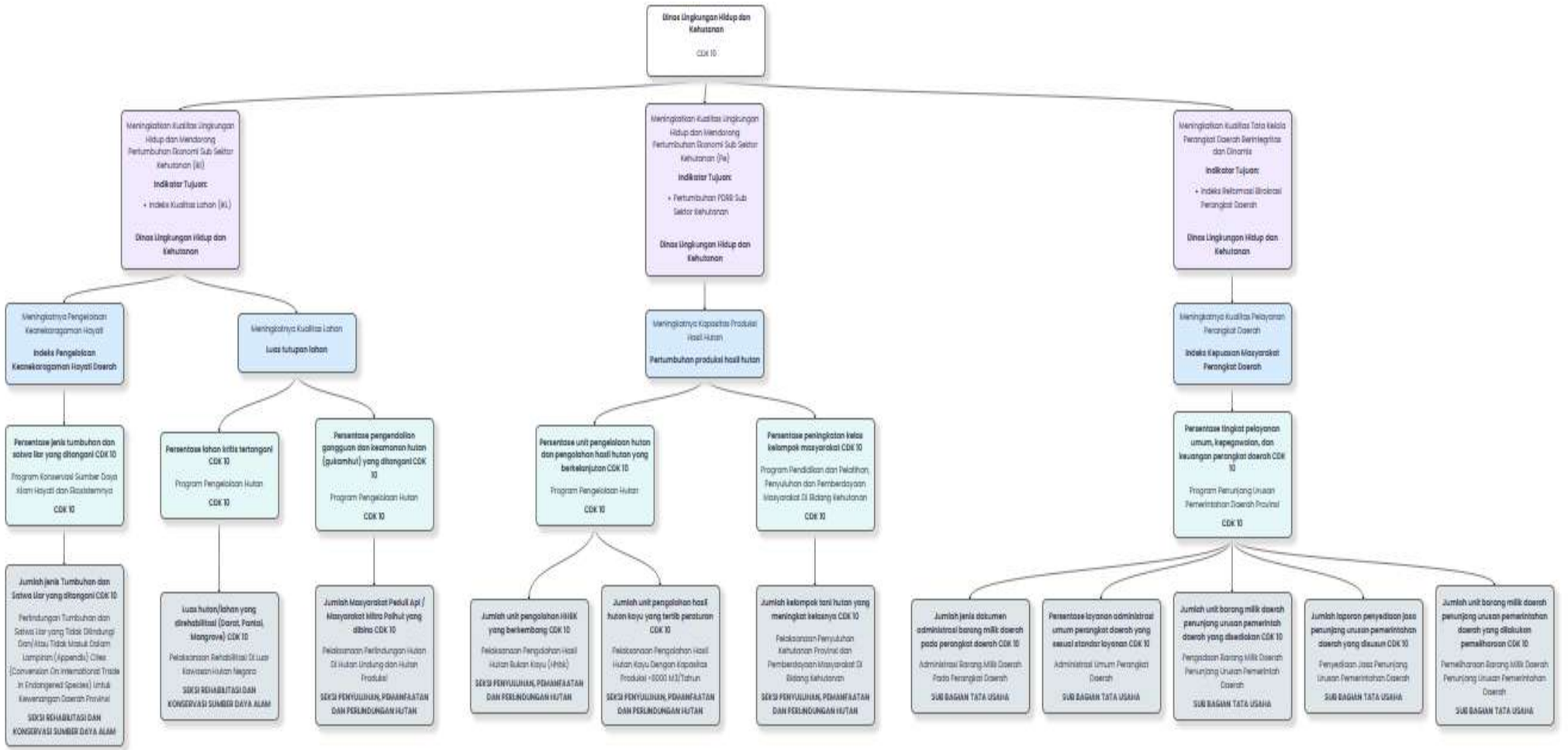

Cascading CDK 11

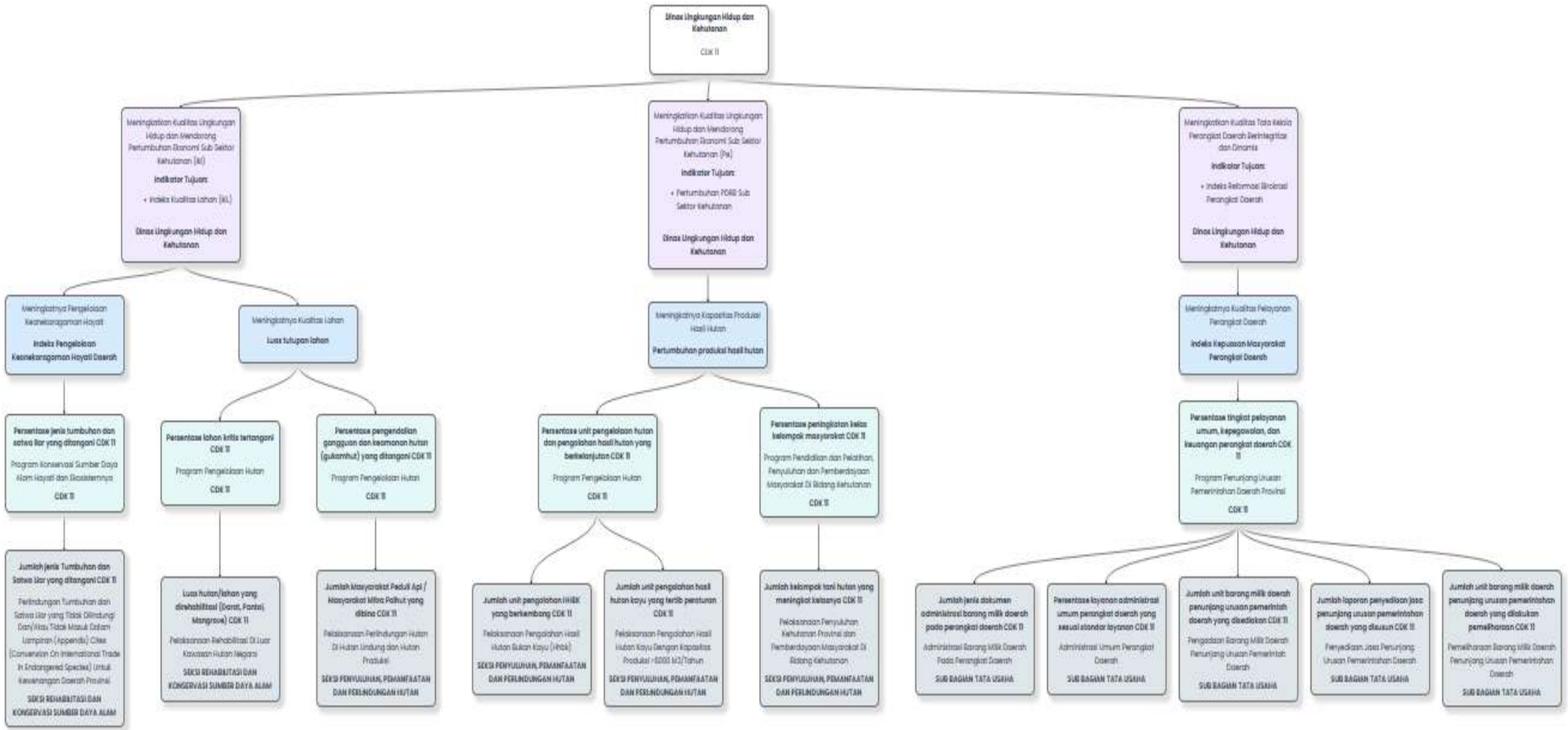

Tabel 1. Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan								
1	Sasaran Strategis	Menurunnya pencemaran air permukaan	Indeks pencemaran air	Pembuangan air limbah produksi ke badan air	Risiko Strategis	Kurangnya perhatian pelaku usaha/kegiatan terhadap pengolahan limbah yang tepat	Kondisi kualitas sungai tidak sesuai baku mutu air	Pemerintah dan Masyarakat
2	Sasaran Strategis	Menurunnya pencemaran udara	Kualitas udara pada konsentrasi SO2 dan NO2	Pencemaran udara berasal dari aktivitas industri	Risiko Strategis	Kurangnya perhatian pelaku usaha/kegiatan terhadap pengolahan emisi gas buang dalam proses produksi	Gas buang yang dihasilkan dapat mempengaruhi iklim global, termasuk peningkatan suhu dan perubahan cuaca ekstrem	Pemerintah dan Masyarakat
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas lahan	Luas tutupan lahan	Degradasi lahan	Risiko Strategis	Gangguan keamanan hutan seperti pengundulan hutan dan kebakaran hutan	Menurunnya produktivitas dan daya dukung lahan	Pemerintah dan Masyarakat
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Konversi habitas alami spesies	Risiko Strategis	Perubahan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya dan pemukiman	Kehilangan keanekaragaman hayati	Pemerintah dan Masyarakat
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas produksi hasil hutan	Pertumbuhan produksi hasil hutan	Penebangan hutan secara berlebihan	Risiko Strategis	Adanya Ketimpangan antara pasokan dan permintaan bahan baku kayu	Terhambatnya produktivitas dan nilai tambah hasil hutan	Pemerintah dan Masyarakat
6	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Lambatnya pelayanan terhadap masyarakat	Risiko Reputasi	Keterbatasan kapasitas SDM tenaga teknis	Terjadi penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Pemerintah dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
7	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Adanya benturan kepentingan	Risiko Fraud	Belum optimalnya pengelolaan risiko di DLHK	Penurunan tingkat integritas	Pemerintah dan Masyarakat
Sekretariat								
8	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan program/kegiatan tidak tepat sasaran	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pengawasan dalam proses perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Target kinerja OPD tidak tercapai	DLH Prov. Jateng
9	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pengawasan Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Terhambatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	DLH Prov. Jateng
10	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Risiko Operasional	Kurangnya monitoring terhadap proses pengumpulan data	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan	DLH Prov. Jateng
11	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Keterlambatan penyusunan dokumen administrasi keuangan	Risiko Operasional	Data keuangan tidak lengkap	Dokumen administrasi keuangan tidak akurat	DLH Prov. Jateng
12	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Klaim asuransi BMD ditolak	Risiko Operasional	Pemenuhan klaim administrasi tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di polis asuransi	Kerugian negara atas kehilangan/kerusakan BMD	DLH Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
13	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Layanan kepegawaian tidak dapat diproses	Risiko Operasional	Kurang lengkapnya berkas kepegawaian	Pelayanan pegawai tidak maksimal	DLH Prov. Jateng
14	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Masih adanya kebutuhan Administrasi Umum yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	Risiko Operasional	Peyusunan RAB tahun anggaran berjalan tidak memperhatikan daftar kebutuhan barang yang disusun pada periode sebelumnya	Terhambatnya pelaksanaan operasional kegiatan	DLH Prov. Jateng
15	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Masih adanya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	Risiko Operasional	Peyusunan RAB tahun anggaran berjalan tidak memperhatikan daftar kebutuhan barang yang disusun pada periode sebelumnya	Terhambatnya pelaksanaan operasional kegiatan	DLH Prov. Jateng
16	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	Risiko Fraud	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara	DLH Prov. Jateng
17	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Keterlambatan pemeliharaan barang milik daerah	Risiko Operasional	Pemeliharaan BMD tidak sepenuhnya mengacu pada RKBMD	Terhambatnya pelaksanaan operasional kegiatan	DLH Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup								
18	Sasaran Program	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan	Penurunan daya dukung lingkungan	Risiko Strategis	Kurangnya Prioritas Isu Lingkungan Hidup Dalam Visi Misi Kepala Daerah	Perbaikan kualitas lingkungan hidup berjalan statis	Pemerintah, Swasta, Masyarakat, Umum
19	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup	Penyusunan program kerja tidak sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup	Risiko Kemitraan	Personil di daerah tidak memahami pentingnya program green leadership	Pengelolaan lingkungan tidak efektif dan efisien	Pemerintah, Swasta, Masyarakat, Umum
20	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi	Rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat mengatasi dampak	Risiko Strategis	Kurangnya informasi data yang perlu dilengkapi dalam penyusunan dokumen	Pengelolaan lingkungan tidak efektif dan efisien	Pemerintah dan Masyarakat
21	Sasaran Program	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan	Proses persetujuan lingkungan tidak dapat dilanjutkan	Risiko Operasional	Substansi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan tidak mendapatkan persetujuan lingkungan atas usaha/kegiatan	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
22	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan	Keterlambatan penerbitan rekomendasi dan persetujuan lingkungan	Risiko Operasional	Kualitas dokumen lingkungan belum sesuai ketentuan	Proses penerbitan rekomendasi dan persetujuan lingkungan tidak sesuai SOP	Pemrakarsa/ pelaku rencana usaha dan/atau kegiatan
23	Sasaran Program	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	Upaya peningkatan kapasitas kepedulian lingkungan hidup tidak efektif	Risiko Operasional	Belum optimalnya sinergitas para pihak dalam upaya peningkatan kapasitas kepedulian lingkungan hidup	Masih adanya pencemaran terhadap lingkungan hidup	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
24	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Sekolah tidak mematuhi standar yang ditetapkan dalam rencana gerakan PBLHS	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman sekolah terhadap regulasi tentang Sekolah Adiwiyata	Sekolah tidak lolos seleksi calon sekolah adiwiyata	DLHK Provinsi Jawa Tengah, DLH Kab/Kota, pihak sekolah
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup								
25	Sasaran Program	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	Masih adanya pencemaran sungai yang belum tertangani	Risiko Operasional	Kurang optimalnya sinergitas antar stakeholder dalam pengendalian pencemaran air	Menurunnya kualitas sungai	DLHK Prov. Jateng dan Masyarakat
26	Sasaran Program	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	Masih adanya pencemaran udara di Kab/Kota yang belum tertangani	Risiko Operasional	Kurang optimalnya sinergitas antar stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara	Menurunnya kualitas udara ambien	Pemprov Jateng dan Masyarakat
27	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu	Pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan	Risiko Operasional	Frekuensi pembinaan tidak sebanding jumlah usaha dan/atau kegiatan yang harus dilakukan pembinaan	Target jumlah usaha/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu tidak tercapai	DLHK Prov. Jateng dan Masyarakat
28	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi yang melakukan aksi penurunan emisi ditingkat tapak	Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kerentanan lokasi	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam identifikasi kerentanan terhadap perubahan iklim	Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan ikim yang dilaksanakan tidak berdampak pada penurunan emisi grk	DLHK Prov. Jateng dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
29	Sasaran Program	Program Pengelolaan Keanekaragakan Hayati (KEHATI)	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	Eksploitasi keanekaragaman hayati	Risiko Operasional	Kurangya informasi terkait regulasi pengelolaan keanekaragaman hayati	Hilangnya keanekaragaman hayati	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
30	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani	Pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati tidak merata	Risiko Operasional	Keterbatasan informasi lokasi pelestarian keanekaragaman hayati	Target luas lokasi pelestarian keanekaragaman hayati yang ditangani tidak tercapai	DLHK Prov.Jateng & DLH Kab/Kota
31	Sasaran Program	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	Masih adanya Limbah B3 yang belum tertangani	Risiko Operasional	Kurang optimalnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	Terjadinya Pencemaran Limbah B3 ke Lingkungan di Jawa Tengah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
32	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola	Penugasan personil yang tidak kompeten	Risiko Operasional	Kurangnya Pemahaman dan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	Limbah B3 tidak terkelola	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
33	Sasaran Program	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan sampah yang terkelola	Pengelolaan sampah di Jawa Tengah belum terpadu	Risiko Operasional	Implementasi road map sampah belum optimal	Tidak tercapainya target Persentase sampah yang terkelola	Pemprov Jateng, Pemkab, Pemkota dan Masyarakat
34	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Keterlambatan pembangunan TPST Regional	Risiko Operasional	Readiness Criteria Pembangunan TPST regional tidak terpenuhi	Sampah tidak tertangani	Pemprov Jateng, Pemkab Magelang, Pemkot Magelang dan Masyarakat
Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan								
35	Sasaran Program	Program Pengelolaan Hutan	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	Kekeliruan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan pengelolaan hutan	Risiko Strategis	Adanya ketidaksinkronan antara sumber yang satu dengan yang lain	Kerusakan kawasan hutan	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
36	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen penatagunaan kawasan hutan	Kesalahan dalam menganalisa data untuk bahan pertimbangan	Risiko Operasional	Perubahan data terkait perijinan atau pemanfaatan hutan di tingkat Pusat sangat cepat sehingga mempengaruhi analisa data	Data yang tertuang dalam Pertimbangan teknis tidak sesuai dengan kondisi lapangan terkini	Biro ISDA Setda Prov. Jateng, Dinas ESDM, BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta, Perum Perhutani
37	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah dokumen data informasi pemanfaatan hutan	Pelaku usaha melanggar ketentuan dalam kontrak kerja/PKS	Risiko Kepatuhan	Pemegang ijin PPKH tidak melaksanakan kewajiban atas pemberian ijin pemanfaatan kawasan hutan	Ijin usaha atau kerjasama pemanfaatan kawasan hutan tidak diperpanjang	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD, Pemegang PPKH
38	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang	Unit pengolahan HHBK tidak berkembang	Risiko Operasional	Kurangnya informasi pengembangan serta pemasaran hasil hutan bukan kayu	Pengolahan hhbk belum berdampak bagi kesejahteraan masyarakat	DLHK Prov. Jateng, Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani, UMKM, Calon Industri Pengolahan HHBK, Pemegang PBPHHBK, Tempat Pengumpul HHBK, Pemegang Persetujuan perhutanan Sosial
39	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan	Unit pengolahan hasil hutan kayu tidak berkembang	Risiko Operasional	Industri dan masyarakat kurang mengetahui kondisi dan potensi hutan rakyat di Jawa Tengah	Terhambatnya investasi	DLHK Prov. Jateng,Pemegang PBPHH, TPTKB
40	Sasaran Program	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	Penentuan prioritas peningkatan kelas KTH tidak konsisten dan tidak tepat sasaran	Risiko Operasional	Ketidaksesuaian antara dokumen penyuluhan dengan implementasi kegiatan	Target prioritas KTH tidak tercapai	KTH/Masyarakat dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
41	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya	Konflik internal KTH	Risiko Operasional	Pergantian pengurus KTH	Penurunan etos kerja KTH dalam kelola kelembagaan, kawasan dan usaha	KTH/Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam								
42	Sasaran Program	Program Pengelolaan Hutan	Persentase lahan kritis tertangani	Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak tepat berada pada lahan kritis	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen dalam penentuan lokasi RHL	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tidak berimbas pada upaya penurunan luas lahan kritis	Masyarakat dan Pemerintah Prov. Jateng
43	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove)	Pelaksanaan rehabilitasi hutan/lahan tidak sesuai sasaran RURHL	Risiko Operasional	Usulan lokasi RHL kurang sesuai dengan sasaran RURHL	Upaya peningkatan luas tutupan lahan kurang optimal	Masyarakat dan Pemerintah Prov. Jateng
44	Sasaran Program	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	Masih ada TSL kewenangan provinsi yang tidak dilindungi	Risiko Operasional	Kurangnya peraturan daerah tentang perlindungan TSL tidak dilindungi	Menurunnya keanekaragaman hayati	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
45	Sasaran Program	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	Potensi kerusakan ekosistem calon areal preservasi	Risiko Operasional	Belum tersedianya data kawasan yang berpotensi ditetapkan areal preservasi	Kehilangan keanekaragaman hayati	Masyarakat dan Pemerintah Prov. Jateng
46	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani	Data TSL kewenangan provinsi belum mutakhir	Risiko Operasional	kurangnya kompetensi SDM prov dan kab/kota dalam mengidentifikasi TSL kewenangan provinsi	Tidak terkoordinirnya perencanaan perlindungan TSL dalam satu kesatuan wilayah provinsi Jateng	Masyarakat dan Pemerintah Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
47	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Pengendalian pengelolaan KBEP	Belum seluruh pihak terkait melaksanakan rencana aksi Pengelolaan KBEP	Risiko Kemitraan	Kurangnya komitmen pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan KBEP	KBEP belum memberikan manfaat optimal secara ekologi maupun ekonomi	Masyarakat dan Pemerintah Prov. Jateng
48	Sasaran Program	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	Penanganan DAS Prioritas tidak tepat berada pada lahan kritis	Operasional	Kurangnya pemahaman, keterlibatan dan komitmennya para pemangku kepentingan/stakeholders	Pelaksanaan penanganan DAS tidak berimbas pada upaya penurunan luas lahan kritis	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
49	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya	Keterbatasan kewenangan DLHK dalam pengelolaan DAS	Risiko Kepatuhan	Terdapat perbedaan peraturan dan persepsi antara pihak terkait	Pengelolaan DAS tidak optimal	Masyarakat dan Pemerintah Prov. Jateng
Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan								
50	Sasaran Program	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	Kegiatan pencemaran tidak termonitor	Risiko Kemitraan	Personel tidak memahami teknis pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan	Meningkatnya pencemaran lingkungan	Lingkungan dan masyarakat di sekitar usaha/kegiatan
51	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha berijin yang taat	Petugas berpotensi memanipulasi data hasil pengawasan	Risiko Fraud	Benturan kepentingan antara petugas dengan pelaku usaha	Usaha yang dijalankan tidak sesuai aturan	Pemegang izin usaha dan/atau kegiatan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
52	Sasaran Program	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang ditangani	Aduan tidak dapat ditindaklanjuti	Risiko Operasional	Aduan tidak memuat informasi lengkap/terinci	Target Aduan yang ditindaklanjuti tidak tercapai	Lingkungan dan masyarakat di sekitar usaha/kegiatan
53	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah laporan aduan yang ditangani	Aduan pencemaran lingkungan tidak terbukti	Risiko Operasional	Kondisi lingkungan yang berubah ketika verifikasi lapangan	Aduan tidak terselesaikan & terjadi pengaduan ulang perihal yang sama	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
54	Sasaran Program	Program Pengelolaan Hutan	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	Keterbatasan kewenangan DLHK Provinsi Jateng dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan	Risiko Kepatuhan	Intervensi penanganan perlindungan dan pengaman sesuai Tugas Fungsi DLHK Prov. Jateng sudah diatur dalam pergub SOTK	Gangguan keamanan hutan tidak terkendali	Masyarakat sekitar hutan
55	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan	Adanya kejadian gangguan keamanan hutan yang tidak terlaporkan	Risiko Kemitraan	Keterbatasan jumlah penyuluh di CDK untuk melakukan monev perlindungan hutan	Kurang optimalnya penanganan kasus perlindungan hutan	Masyarakat sekitar hutan
Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup								
56	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pengawasan Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Terhambatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	BPL2H, DLHK Prov. Jateng
57	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah BPL2H	Klaim asuransi BMD ditolak	Risiko Operasional	Pemenuhan klaim administrasi tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di polis asuransi	Kerugian negara atas kehilangan/kerusakan BMD	BPL2H, DLHK Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
58	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BPL2H	Masih adanya kebutuhan Administrasi Umum yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	Risiko Operasional	Peyusunan RAB tahun anggaran berjalan tidak memperhatikan daftar kebutuhan barang yang disusun pada periode sebelumnya	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	BPL2H, DLHK Prov. Jateng
59	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan BPL2H	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	Risiko Fraud	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara	BPL2H, DLHK Prov. Jateng
60	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BPL2H	Masih adanya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	Risiko Operasional	Peyusunan RAB tahun anggaran berjalan tidak memperhatikan daftar kebutuhan barang yang disusun pada periode sebelumnya	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	BPL2H, DLHK Prov. Jateng
61	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BPL2H	Keterlambatan pemeliharaan barang milik daerah	Risiko Operasional	Pemeliharaan BMD tidak sepenuhnya mengacu pada RKBMD	Terhambatnya pelaksanaan operasional kegiatan	BPL2H, DLHK Prov. Jateng
62	Sasaran Program	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup	Penurunan jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan hidup	Risiko Operasional	Regulasi untuk parameter kualitas air yang harus diuji tidak lagi harus 1 (satu) paket tetapi diambil parameter kunci atau yang memiliki dampak terbesar/signifikan	Realisasi jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan hidup tidak tercapai	BPL2H, DLHK Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
63	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik /sampel pada lokasi pemantauan kualitas lingkungan hidup	Kegagalan pengambilan sampel kualitas lingkungan hidup	Risiko Operasional	Pengambilan sampel air dan udara tidak memenuhi syarat atau ditunda/batal karena terbatasnya parameter pengujian	Berkurangnya jumlah titik uji/unit kualitas udara sesuai target/rencana sampling.	Petugas pengambil contoh, analis laboratorium, pejabat struktural, petugas administrasi, BPL2H, DLHK Prov. Jateng
64	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan	Pengurangan jumlah parameter uji yang masuk ruang lingkup akreditasi dan/atau registrasi laboratorium lingkungan	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya jaminan mutu dan/atau pengendalian mutu parameter pengujian laboratorium yang terakreditasi dan/atau teregistrasi	Penurunan kepercayaan pelanggan	BPL2H, DLHK Prov. Jateng, pelanggan BPL2H
Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan								
65	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pengawasan Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Terhambatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	BSPTH, DLHK Prov. Jateng
66	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah BSPTH	Klaim asuransi BMD ditolak	Risiko Operasional	Pemenuhan klaim administrasi tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di polis asuransi	Kerugian negara atas kehilangan/kerusakan BMD	BSPTH, DLHK Prov. Jateng
67	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BSPTH	Masih adanya kebutuhan Administrasi Umum yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	Risiko Operasional	Peyusunan RAB tahun anggaran berjalan tidak memperhatikan daftar kebutuhan barang yang disusun pada periode sebelumnya	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	BSPTH, DLHK Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
68	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan BSPTH	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	Risiko Fraud	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara	BSPTH, DLHK Prov. Jateng
69	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BSPTH	Masih adanya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	Risiko Operasional	Peyusunan RAB tahun anggaran berjalan tidak memperhatikan daftar kebutuhan barang yang disusun pada periode sebelumnya	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	BSPTH, DLHK Prov. Jateng
70	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BSPTH	Keterlambatan pemeliharaan barang milik daerah	Risiko Operasional	Pemeliharaan BMD tidak sepenuhnya mengacu pada RKBMD	Terhambatnya pelaksanaan operasional kegiatan	BSPTH, DLHK Prov. Jateng
71	Sasaran Program	Program Pengelolaan Hutan	Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	Pelayanan fasilitasi bibit terbatas pada jenis bibit tertentu yang ada di persemaian/kebun	Risiko Operasional	Keterbatasan jenis bibit yang diproduksi	Target distribusi bibit kepada masyarakat tidak tercapai	DLHK Prov. Jateng, BSPTH, CDK/UPT, KLHK, Instansi/Lembaga, Kelompok Tani, Masyarakat
72	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH	Petugas memanipulasi data verifikasi	Risiko Fraud	Benturan kepentingan antara petugas dengan pelaku usaha	Usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tidak sesuai aturan	DLHK Prov. Jateng, BSPTH, pelaku usaha perbenihan, kelompok masyarakat
Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A								
73	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pengawasan Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Terhambatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	TAHURA, DLHK Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
74	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah TAHURA	Klaim asuransi BMD ditolak	Risiko Operasional	Pemenuhan klaim administrasi tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di polis asuransi	Kerugian negara atas kehilangan/kerusakan BMD	TAHURA, DLHK Prov. Jateng
75	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan TAHURA	Masih adanya kebutuhan Administrasi Umum yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	Risiko Operasional	Peyusunan RAB tahun anggaran berjalan tidak memperhatikan daftar kebutuhan barang yang disusun pada periode sebelumnya	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	TAHURA, DLHK Prov. Jateng
76	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan TAHURA	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	Risiko Fraud	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara	TAHURA, DLHK Prov. Jateng
77	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun TAHURA	Masih adanya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	Risiko Operasional	Peyusunan RAB tahun anggaran berjalan tidak memperhatikan daftar kebutuhan barang yang disusun pada periode sebelumnya	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	TAHURA, DLHK Prov. Jateng
78	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan TAHURA	Keterlambatan pemeliharaan barang milik daerah	Risiko Operasional	Pemeliharaan BMD tidak sepenuhnya mengacu pada RKBMD	Terhambatnya pelaksanaan operasional kegiatan	TAHURA, DLHK Prov. Jateng
79	Sasaran Program	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan	Pengelolaan kawasan konservasi tahura belum ada acuan	Risiko Operasional	Proses penyusunan Rencana Pengelolaan Tahura belum selesai	Pengelolaan tahura tidak berjalan optimal	TAHURA, DLHK Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
80	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura	Gangguan keamanan hutan	Risiko Operasional	Kurang keterlibatan masyarakat dalam pengamanan tahura	Peningkatan kerusakan kawasan tahura	TAHURA, DLHK Prov. Jateng
81	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Pemanfaatan Jasa lingkungan	Kurang minatnya masyarakat terhadap Pemanfaatan Jasa lingkungan Tahura	Risiko Operasional	Kurangnya daya tarik kawasan tahura	Kontribusi tahura tidak mencapai target PAD	TAHURA, DLHK Prov. Jateng
82	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah luas kawasan yang bernilai kehati tinggi	Restorasi Kawasan tidak sesuai sasaran	Risiko Operasional	Pelaksanaan RHL belum optimal	Masih adanya lahan kritis	TAHURA, DLHK Prov. Jateng
Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B								
83	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pengawasan Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Terhambatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	KRB, DLHK Prov. Jateng
84	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah TAHURA	Klaim asuransi BMD ditolak	Risiko Operasional	Pemenuhan klaim administrasi tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di polis asuransi	Kerugian negara atas kehilangan/kerusakan BMD	KRB, DLHK Prov. Jateng
85	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan TAHURA	Masih adanya kebutuhan Administrasi Umum yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	Risiko Operasional	Peyusunan RAB tahun anggaran berjalan tidak memperhatikan daftar kebutuhan barang yang disusun pada periode sebelumnya	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	KRB, DLHK Prov. Jateng
86	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan TAHURA	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	Risiko Fraud	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara	KRB, DLHK Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
87	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun TAHURA	Masih adanya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	Risiko Operasional	Peyusunan RAB tahun anggaran berjalan tidak memperhatikan daftar kebutuhan barang yang disusun pada periode sebelumnya	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	KRB, DLHK Prov. Jateng
88	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan TAHURA	Keterlambatan pemeliharaan barang milik daerah	Risiko Operasional	Pemeliharaan BMD tidak sepenuhnya mengacu pada RKBMD	Terhambatnya pelaksanaan operasional kegiatan	KRB, DLHK Prov. Jateng
89	Sasaran Program	Program Pengelolaan Keanekaragakan Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden	Koleksi tumbuhan tidak terpelihara	Risiko Operasional	Belum optimalnya pemeliharaan koleksi tumbuhan	Berkurangnya koleksi tumbuhan Kebun Raya Baturraden	KRB, DLHK Prov. Jateng
90	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden	Pembukaan vak koleksi tumbuhan di Kebun Raya Baturraden tidak terlaksana	Risiko Operasional	Terhambatnya ijin penebangan pohon untuk pembukaan vak koleksi tumbuhan	Target unit pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden tidak tercapai sehingga tumbuhan hasil eksplorasi tidak dapat ditanam	KRB, DLHK Prov. Jateng
91	Sasaran Program	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden	Terjadinya kehilangan/kerusakan koleksi tumbuhan Kebun Raya Baturraden	Risiko Operasional	Akses masuk ke Kebun Raya Baturraden sangat terbuka	Pemanfaatan koleksi tumbuhan tidak optimal	TAHURA, DLHK Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
92	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di Kebun Raya Baturraden	Jenis tumbuhan yang dilestarikan tidak dapat teridentifikasi dengan tepat	Risiko Operasional	Registrasi Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden belum optimal	Perlakuan terhadap jenis tumbuhan tidak tepat	TAHURA, DLHK Prov. Jateng
Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I-XI								
93	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I-XI	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pengawasan Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Terhambatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	CDK I-XI, DLHK Prov. Jateng
94	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK I-XI	Klaim asuransi BMD ditolak	Risiko Operasional	Pemenuhan klaim administrasi tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di polis asuransi	Kerugian negara atas kehilangan/kerusakan BMD	CDK I-XI, DLHK Prov. Jateng
95	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK I-XI	Masih adanya kebutuhan Administrasi Umum yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	Risiko Operasional	Peyusunan RAB tahun anggaran berjalan tidak memperhatikan daftar kebutuhan barang yang disusun pada periode sebelumnya	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	CDK I-XI, DLHK Prov. Jateng
96	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK I-XI	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	Risiko Fraud	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara	CDK I-XI, DLHK Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
97	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK I-XI	Masih adanya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	Risiko Operasional	Peyusunan RAB tahun anggaran berjalan tidak memperhatikan daftar kebutuhan barang yang disusun pada periode sebelumnya	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	CDK I-XI, DLHK Prov. Jateng
98	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK I-XI	Keterlambatan pemeliharaan barang milik daerah	Risiko Operasional	Pemeliharaan BMD tidak sepenuhnya mengacu pada RKBMD	Terhambatnya pelaksanaan operasional kegiatan	CDK I-XI, DLHK Prov. Jateng
99	Sasaran Program	Program Pengelolaan Hutan	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK I-XI	Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak tepat berada pada lahan kritis	Risiko Operasional	Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan kurang memperhatikan lokasi lahan kritis	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tidak berimbas pada upaya penurunan luas lahan kritis	CDK I-XI, Pemerintah Desa, Masyarakat/KTH
100	Sasaran Program	Program Pengelolaan Hutan	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK I-XI	Telambatnya penanganan kebakaran hutan	Risiko Operasional	Keterbatasan Sarpras Karhutla	Meluasnya kebakaran hutan dan sulit ditangani	CDK I-XI, Pemerintah Desa, Masyarakat/KTH
101	Sasaran Program	Program Pengelolaan Hutan	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK I-XI	Wilayah kerja penyuluh terlalu luas dibandingkan jumlah penyuluh yang ada	Risiko Operasional	keterbatasan jumlah penyuluh di CDK	Kurang intensifnya penyuluh dalam melakukan pendampingan/konsultansi terkait HHBK	CDK I-XI, Pemerintah Desa, Masyarakat/KTH
102	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK I-XI	Masyarakat kurang mendukung upaya rehabilitasi hutan/lahan	Risiko Operasional	Adanya pemanfaatan lahan untuk kepentingan lainnya oleh masyarakat	Luasan hutan yang direhabilitasi kurang terpenuhi	CDK I-XI, Pemerintah Desa, Masyarakat/KTH

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
103	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK I-XI	Rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat menjadi MPA dan MMP	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen masyarakat untuk terlibat menjadi MPA dan MMP	Penanganan perlindungan hutan tidak sesuai dengan ketentuan	CDK I-XI, Pemerintah Desa, Masyarakat/KTH
104	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK I-XI	Fasilitasi sarana dan prasarana budidaya HHBK tidak terpakai (mangkrak)	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan Sarana dan prasarana budidaya HHBK	HHBK tidak dapat diolah	CDK I-XI, Pemerintah Desa, Masyarakat/KTH
105	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK I-XI	Pelanggaran aturan dalam pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu	Risiko Operasional	Industri banyak yang belum berijin, Kurangnya tenaga pembinaan industri pengolahan hasil hutan	Terganggunya kinerja dan keberlanjutan industri pengolahan hasil hutan kayu	CDK I-XI, Pemerintah Desa, Masyarakat/KTH
106	Sasaran Program	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK I-XI	Belum semua pihak terkait bersedia mengambil peran dalam perencanaan perlindungan TSL	Risiko Operasional	Perbedaan kepentingan serta keterbatasan kewenangan untuk menangani TSL	Menurunnya keanekaragaman hayati	CDK I-XI, Masyarakat/KTH
107	Sasaran Program	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK I-XI	Belum seluruh pihak terkait melaksanakan rencana aksi Pengelolaan KBEP	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan KBEP	KBEP belum memberikan manfaat optimal secara ekologi maupun ekonomi	CDK I-XI, Masyarakat/KTH
108	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK I-XI	Data TSL belum mutakhir	Risiko Operasional	Keterbatasan kapasitas SDM dan sarpras dalam mengidentifikasi TSL	Tidak diketahuinya potensi dan sebaran TSL	CDK I-XI, Masyarakat/KTH

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
109	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK I-XI	Tidak terpantauan pelaksanaan pengelolaan KBEP sesuai rencana aksi	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman SDM terhadap metode monev pengelolaan KBEP	KBEP tidak terkelola dengan baik	CDK I-XI, Masyarakat/KTH
110	Sasaran Program	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK I-XI	KTH tidak ada perkembangan aktivitas	Risiko Operasional	Kurangnya dukungan kelompok masyarakat dalam kelembagaan KTH	Peningkatan kesejahteraan masyarakat belum signifikan	CDK I-XI, Pemerintah Desa, Masyarakat/KTH
111	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK I-XI	Bukti dukung kegiatan kelompok tidak dapat disampaikan pada saat penilaian kelas KTH	Risiko Operasional	Tidak berjalannya kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha kelompok	Tidak meningkatnya kelas kelompok	CDK I-XI, Pemerintah Desa, Masyarakat/KTH

Tabel 2. Analisis Risiko

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan										
1	Pembuangan air limbah produksi ke badan air	4	4	16	Ada	Monitoring dan evaluasi terkait penanganan pencemaran air sungai dan pembinaan pengelolaan air limbah	Memadai	3	4	12
2	Pencemaran udara berasal dari aktivitas industri	4	4	16	Ada	Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan inventarisasi GRK yang mencerminkan profil emisi riil di Jawa Tengah	Memadai	3	4	12
3	Degradasi lahan	4	4	16	Ada	Monitoring dan evaluasi terkait penanganan gangguan keamanan hutan dan lahan dengan pemangku wilayah	Memadai	3	4	12
4	Konversi habitas alami spesies	4	4	16	Ada	Koordinasi lintas sektor dalam rangka pengaturan perlindungan TSL	Memadai	3	4	12
5	Penebangan hutan secara berlebihan	4	4	16	Ada	Monitoring dan evaluasi terkait Perizinan Pengolahan Hasil Hutan kayu	Memadai	3	4	12
6	Lambatnya pelayanan terhadap masyarakat	4	4	16	Ada	Monitoring dan evaluasi terkait pelayanan terhadap masyarakat secara berkala	Memadai	3	4	12
7	Adanya benturan kepentingan	3	5	15	Ada	Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan risiko secara berkala	Memadai	3	4	12

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Sekretariat										
8	Pelaksanaan program/kegiatan tidak tepat sasaran	3	4	12	Ada	Rapat koordinasi perencanaan dan evaluasi secara periodik	Memadai	3	3	9
9	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	3	4	12	Ada	Koordinasi Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Memadai	3	3	9
10	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	2	3	6	Ada	Himbauan kepada unit kerja untuk menyampaikan data secara cepat dan akurat	Memadai	2	2	4
11	Keterlambatan penyusunan dokumen administrasi keuangan	2	3	6	Ada	Himbauan kepada unit kerja untuk menyampaikan data secara cepat dan akurat	Memadai	2	2	4
12	Klaim asuransi BMD ditolak	2	3	6	Ada	Verifikasi dokumen dan fisik BMD serta Konsolidasi Laporan BMD	Memadai	2	2	4
13	Layanan kepegawaian tidak dapat diproses	2	3	6	Ada	Himbauan untuk melengkapi berkas kepegawaian secara periodik	Memadai	2	2	4

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
14	Masih adanya kebutuhan Administrasi Umum yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas penyediaan administrasi umum dan pencermatan RAB secara detail	Memadai	2	2	4
15	Masih adanya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas penyediaan jasa penunjang secara detail	Memadai	2	2	4
16	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	3	5	15	Ada	Meningkatkan pengawasan berjenjang dalam proses pengadaan barang dan jasa	Memadai	3	4	12
17	Keterlambatan pemeliharaan barang milik daerah	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas pemeliharaan barang milik daerah	Memadai	2	2	4

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup										
18	Penurunan daya dukung lingkungan	4	4	16	Ada	Updating Data D3TLH tiap Tahun	Memadai	3	4	12
19	Penyusunan program kerja tidak sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup	4	4	16	Ada	Menerbitkan SK Gub. Tentang Tim Penyusun Dokumen DIKPLHD Provinsi Jawa Tengah	Memadai	3	4	12
20	Rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat mengatasi dampak	4	4	16	Ada	Sosialiasi Peraturan terbaru terkait Penyusunan KLHS dan melakukan Bimtek Kepada Kab/Kota dalam rangka penyusunan Dokumen KLHS	Memadai	3	4	12
21	Proses persetujuan lingkungan tidak dapat dilanjutkan	4	4	16	Ada	Memberikan pendampingan dan sosialisasi dalam proses persetujuan lingkungan	Memadai	3	4	12
22	Keterlambatan penerbitan rekomendasi dan persetujuan lingkungan	4	4	16	Ada	Sosialisasi proses persetujuan lingkungan	Memadai	3	4	12
23	Upaya peningkatan kapasitas kepedulian lingkungan hidup tidak efektif	4	4	16	Ada	Koordinasi para pihak dalam upaya peningkatan kapasitas kepedulian lingkungan hidup	Memadai	3	4	12

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
24	Sekolah tidak mematuhi standar yang ditetapkan dalam rencana gerakan PBLHS	4	4	16	Ada	Pembinaan terhadap Instansi terkait (DLH, Kemenag, Disdik Kab/Kota) dalam upaya pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	Memadai	3	4	12
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup										
25	Masih adanya pencemaran sungai yang belum tertangani	4	4	16	Ada	Sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan pengendalian pencemaran sungai	Memadai	3	4	12
26	Masih adanya pencemaran udara di Kab/Kota yang belum tertangani	4	4	16	Ada	Sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Memadai	3	4	12
27	Pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan	4	4	16	Ada	Penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, pembinaan pelaku usaha dan/atau kegiatan skala kecil menengah dan besar	Memadai	3	4	12
28	Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kerentanan lokasi	4	4	16	Ada	Sosialisasi pelaksanaan program kampung iklim	Memadai	3	4	12
29	Eksploitasi keanekaragaman hayati	4	4	16	Ada	Rapat penyusunan dokumen rencana pengelolaan kehati	Memadai	3	4	12

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
30	Pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati tidak merata	4	4	16	Ada	Rapat-rapat koordinasi rencana pengelolaan kehati	Memadai	3	4	12
31	Masih adanya Limbah B3 yang belum tertangani	4	4	16	Ada	Koordinasi dan Sinkronisasi terkait kebijakan Pengelolaan Limbah B3	Memadai	3	4	12
32	Penugasan personil yang tidak kompeten	4	4	16	Ada	Menetapkan kriteria Personil yang ditugaskan dalam surat undangan	Memadai	3	4	12
33	Pengelolaan sampah di Jawa Tengah belum terpadu	4	4	16	Ada	Road map Pengelolaan Sampah dan Satgas Sampah	Memadai	3	4	12
34	Keterlambatan pembangunan TPST Regional	4	4	16	Ada	Melakukan konsulltasi dengan Biro Organisasi terkait Lembaga Pengelola TPST; Melakukan Rapat pembahasan PKS secara Intensif antara TKSD Provinsi Jateng, TKSD Kabupaten Magelang serta TKSD Kota Magelang; dan melakukan koordinasi dengan perum perhutani dan BPHL untuk penyelesaian PKKNK	Memadai	3	4	12

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan										
35	Kekeliruan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan pengelolaan hutan	4	4	16	Ada	1. Evaluasi pelaksanaan RKTP Provinsi Jawa Tengah 2. Koordinasi data kawasan hutan pada penyusunan Rencana Tata Ruang 3. Nota Dinas Pengumpulan data dan informasi kawasan hutan dari pemangku kawasan hutan	Memadai	3	4	12
36	Kesalahan dalam menganalisa data untuk bahan pertimbangan	4	4	16	Ada	1. Koordinasi intensif terkait perubahan data di tingkat pusat, 2. Melakukan pengecekan data secara online di Web Kementerian Kehutanan (SIGAP). Bukti dukung : laporan/nota dinas	Memadai	3	4	12
37	Pelaku usaha melanggar ketentuan dalam kontrak kerja/PKS	4	4	16	Ada	1. Rekonsiliasi data kewajiban Pemegang PPKH 2. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan kewajiban bagi pemegang PPKH	Memadai	3	4	12
38	Unit pengolahan HHBK tidak berkembang	4	4	16	Ada	FGD pengembangan hhbk	Memadai	3	4	12
39	Unit pengolahan hasil hutan kayu tidak berkembang	4	4	16	Ada	Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan Cabang Dinas Kehutanan/Penyuluh Kehutanan,KLHK Industri PBPHH <6.000 M3/th dll	Memadai	3	4	12

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
40	Penentuan prioritas peningkatan kelas KTH tidak konsisten dan tidak tepat sasaran	4	4	16	Ada	Rapat koordinasi dan rapat sinkronisasi kegiatan penyuluhan	Memadai	3	4	12
41	Konflik internal KTH	4	4	16	Ada	Monitoring kelembagaan KTH oleh penyuluh kehutanan	Memadai	3	4	12
Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam										
42	Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak tepat berada pada lahan kritis	4	4	16	Ada	Koordinasi pelaksanaan RHL, FGD	Memadai	3	4	12
43	Pelaksanaan rehabilitasi hutan/lahan tidak sesuai sasaran RURHL	4	4	16	Ada	Sasaran RURHL sudah dipetakan per masing-masing unit kerja, peningkatan kapasitas SDM dalam penerapan pemilihan lokasi RHL	Memadai	3	4	12
44	Masih ada TSL kewenangan provinsi yang tidak dilindungi	4	4	16	Ada	Survey potensi TSL, Penetapan jenis TSL prioritas yang ditangani dan Identifikasi kehati	Memadai	3	4	12
45	Potensi kerusakan ekosistem calon areal preservasi	4	4	16	Ada	Dalam pelaksanaannya mempedomani aturan UU 32 tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Memadai	3	4	12

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
46	Data TSL kewenangan provinsi belum mutakhir	4	4	16	Ada	Menjadi consulting partner bagi CDK	Memadai	3	4	12
47	Belum seluruh pihak terkait melaksanakan rencana aksi Pengelolaan KBEP	4	4	16	Ada	Koordinasi dengan para pihak yang tertuang dalam SK Gubernur	Memadai	3	4	12
48	Penanganan DAS Prioritas tidak tepat berada pada lahan kritis	4	4	16	Ada	Koordinasi dan Kolaborasi Stakeholders dalam Pengelolaan DAS	Memadai	3	4	12
49	Keterbatasan kewenangan DLHK dalam pengelolaan DAS	4	4	16	Ada	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait	Memadai	3	4	12
Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan										
50	Kegiatan pencemaran tidak termonitor	4	4	16	Ada	Fasilitasi permohonan Kab/Kota terkait bantuan personil pengawasan	Memadai	3	4	12
51	Petugas berpotensi memanipulasi data hasil pengawasan	3	5	15	Ada	Briefing untuk tidak melakukan tindakan koruptif pada pelaksanaan kegiatan	Memadai	3	4	12
52	Aduan tidak dapat ditindaklanjuti	4	4	16	Ada	Menjadi Konsulting partner bagi dan Kab/Kota dalam Pengawasan LH	Memadai	3	4	12
53	Aduan pencemaran lingkungan tidak terbukti	4	4	16	Ada	Melakukan verifikasi lapangan dan mediasi antar pihak	Memadai	3	4	12

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
54	Keterbatasan kewenangan DLHK Provinsi Jateng dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan	4	4	16	Ada	Menetapkan surat keputusan gubernur tentang satuan tugas penanganan karhutla	Memadai	3	4	12
55	Adanya kejadian gangguan keamanan hutan yang tidak terlaporkan	4	4	16	Ada	Melibatkan PKSM dalam kegiatan perlindungan hutan	Memadai	3	4	12
Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup										
56	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	3	3	9	Ada	Koordinasi Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Memadai	2	3	6
57	Klaim asuransi BMD ditolak	2	3	6	Ada	Verifikasi dokumen dan fisik BMD serta Konsolidasi Laporan BMD	Memadai	2	2	4
58	Masih adanya kebutuhan Administrasi Umum yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas penyediaan administrasi umum dan pencermatan RAB secara detail	Memadai	2	2	4
59	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	3	5	15	Ada	Meningkatkan pengawasan berjenjang dalam proses pengadaan barang dan jasa	Memadai	3	4	12

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
60	Masih adanya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas penyediaan jasa penunjang secara detail	Memadai	2	2	4
61	Keterlambatan pemeliharaan barang milik daerah	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas pemeliharaan barang milik daerah	Memadai	2	2	4
62	Penurunan jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan hidup	4	4	16	Ada	Melakukan update metode pengujian laboratorium	Memadai	3	4	12
63	Kegagalan pengambilan sampel kualitas lingkungan hidup	4	4	16	Ada	Melaksanakan Ketentuan dalam SOP Kaji ulang permintaan tender atau Kontrak	Memadai	3	4	12
64	Pengurangan jumlah parameter uji yang masuk ruang lingkup akreditasi dan/atau registrasi laboratorium lingkungan	4	4	16	Ada	Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan KAN dan KLHK	Memadai	3	4	12

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan										
65	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	3	3	9	Ada	Koordinasi Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Memadai	2	3	6
66	Klaim asuransi BMD ditolak	2	3	6	Ada	Verifikasi dokumen dan fisik BMD serta Konsolidasi Laporan BMD	Memadai	2	2	4
67	Masih adanya kebutuhan Administrasi Umum yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas penyediaan administrasi umum dan pencermatan RAB secara detail	Memadai	2	2	4
68	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	3	5	15	Ada	Meningkatkan pengawasan berjenjang dalam proses pengadaan barang dan jasa	Memadai	3	4	12
69	Masih adanya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas penyediaan jasa penunjang secara detail	Memadai	2	2	4
70	Keterlambatan pemeliharaan barang milik daerah	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas pemeliharaan barang milik daerah	Memadai	2	2	4

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
71	Pelayanan fasilitasi bibit terbatas pada jenis bibit tertentu yang ada di persemaian/kebun	3	4	12	Ada	Koordinasi dengan CDK dan Penyuluh kehutanan lapangan terkait distribusi bibit	Memadai	3	3	9
72	Petugas memanipulasi data verifikasi	3	5	15	Ada	Briefing untuk tidak melakukan tindakan koruptif pada pelaksanaan kegiatan	Memadai	3	4	12
Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A										
73	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	3	3	9	Ada	Koordinasi Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Memadai	2	3	6
74	Klaim asuransi BMD ditolak	2	3	6	Ada	Verifikasi dokumen dan fisik BMD serta Konsolidasi Laporan BMD	Memadai	2	2	4
75	Masih adanya kebutuhan Administrasi Umum yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas penyediaan administrasi umum dan pencermatan RAB secara detail	Memadai	2	2	4
76	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	3	5	15	Ada	Meningkatkan pengawasan berjenjang dalam proses pengadaan barang dan jasa	Memadai	3	4	12

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
77	Masih adanya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas penyediaan jasa penunjang secara detail	Memadai	2	2	4
78	Keterlambatan pemeliharaan barang milik daerah	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas pemeliharaan barang milik daerah	Memadai	2	2	4
79	Pengelolaan kawasan konservasi tahura belum ada acuan	4	4	16	Ada	Pelibatan stakeholder dalam perencanaan tahura	Memadai	3	4	12
80	Gangguan keamanan hutan	4	4	16	Ada	Patroli melibatkan kelompok masyarakat	Memadai	3	4	12
81	Kurang minatnya masyarakat terhadap Pemanfaatan Jasa lingkungan Tahura	4	4	16	Ada	Inventarisasi pemanfaatan potensi jasa lingkungan	Memadai	3	4	12
82	Restorasi Kawasan tidak sesuai sasaran	4	4	16	Ada	Eksplorasi dan penanaman	Memadai	3	4	12

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B										
83	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	3	3	9	Ada	Koordinasi Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Memadai	2	3	6
84	Klaim asuransi BMD ditolak	2	3	6	Ada	Verifikasi dokumen dan fisik BMD serta Konsolidasi Laporan BMD	Memadai	2	2	4
85	Masih adanya kebutuhan Administrasi Umum yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas penyediaan administrasi umum dan pencermatan RAB secara detail	Memadai	2	2	4
86	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	3	5	15	Ada	Meningkatkan pengawasan berjenjang dalam proses pengadaan barang dan jasa	Memadai	3	4	12
87	Masih adanya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas penyediaan jasa penunjang secara detail	Memadai	2	2	4
88	Keterlambatan pemeliharaan barang milik daerah	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas pemeliharaan barang milik daerah	Memadai	2	2	4

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
89	Koleksi tumbuhan tidak terpelihara	4	4	16	Ada	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati	Memadai	3	4	12
90	Pembukaan vak koleksi tumbuhan di Kebun Raya Baturraden tidak terlaksana	4	4	16	Ada	Berkoordinasi ke pihak terkait mengenai perijinan penebangan pohon	Memadai	3	4	12
91	Terjadinya kehilangan/kerusakan koleksi tumbuhan Kebun Raya Baturraden	4	4	16	Ada	Patroli berkala, Pengamanan koleksi tertentu	Memadai	3	4	12
92	Jenis tumbuhan yang dilestarikan tidak dapat teridentifikasi dengan tepat	4	4	16	Ada	Melakukan identifikasi jenis tumbuhan	Memadai	3	4	12
Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I-XI										
93	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	3	3	9	Ada	Koordinasi Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Memadai	2	3	6
94	Klaim asuransi BMD ditolak	2	3	6	Ada	Verifikasi dokumen dan fisik BMD serta Konsolidasi Laporan BMD	Memadai	2	2	4

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
95	Masih adanya kebutuhan Administrasi Umum yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas penyediaan administrasi umum dan pencermatan RAB secara detail	Memadai	2	2	4
96	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	3	5	15	Ada	Meningkatkan pengawasan berjenjang dalam proses pengadaan barang dan jasa	Memadai	3	4	12
97	Masih adanya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dalam dokumen anggaran	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas penyediaan jasa penunjang secara detail	Memadai	2	2	4
98	Keterlambatan pemeliharaan barang milik daerah	2	3	6	Ada	Menyusun prioritas pemeliharaan barang milik daerah	Memadai	2	2	4
99	Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak tepat berada pada lahan kritis	4	4	16	Ada	Mengoptimalkan Sumber daya penyuluh untuk mengidentifikasi kebutuhan RHL sesuai lokasi dan melakukan monitoring evaluasi keberhasilan kegiatan RHL	Memadai	3	4	12
100	Telambatnya penanganan kebakaran hutan	4	4	16	Ada	Pengajuan permohonan fasilitasi sarpras karhutla ke DLHK Prov. Jateng	Memadai	3	4	12

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
101	Wilayah kerja penyuluh terlalu luas dibandingkan jumlah penyuluh yang ada	4	4	16	Ada	Kolaborasi dengan pihak terkait dalam melakukan konsultansi dan sosialisai/bimtek	Memadai	3	4	12
102	Masyarakat kurang mendukung upaya rehabilitasi hutan/lahan	4	4	16	Ada	Mengoptimalkan sumber daya penyuluh dalam peningkatan wawasan dan pemahaman masyarakat terkait maksud, tujuan dan fungsi kegiatan RHL	Memadai	3	4	12
103	Rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat menjadi MPA dan MMP	4	4	16	Ada	Sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan agar mau terlibat dalam kelembagaan MPA dan MMP	Memadai	3	4	12
104	Fasilitasi sarana dan prasarana budidaya HHBK tidak terpakai (mangkrak)	4	4	16	Ada	Monev paska sosialisasi/bimtek kepada peserta pelatihan	Memadai	3	4	12
105	Pelanggaran aturan dalam pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu	4	4	16	Ada	Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha	Memadai	3	4	12
106	Belum semua pihak terkait bersedia mengambil peran dalam perencanaan perlindungan TSL	4	4	16	Ada	Melaksanakan Koordinasi dan kolaborasi pihak terkait secara intensif	Memadai	3	4	12

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
107	Belum seluruh pihak terkait melaksanakan rencana aksi Pengelolaan KBEP	4	4	16	Ada	Melaksanakan Koordinasi dan kolaborasi pihak terkait secara intensif	Memadai	3	4	12
108	Data TSL belum mutakhir	4	4	16	Ada	Melibatkan penyuluh untuk pengawasan TSL	Memadai	3	4	12
109	Tidak terpantauan pelaksanaan pengelolaan KBEP sesuai rencana aksi	4	4	16	Ada	Sosialisasi KBEP	Memadai	3	4	12
110	KTH tidak ada perkembangan aktivitas	4	4	16	Ada	Pendampingan dan penyuluhan di bidang kehutanan	Memadai	3	4	12
111	Bukti dukung kegiatan kelompok tidak dapat disampaikan pada saat penilaian kelas KTH	4	4	16	Ada	Melaksanakan monev dan pendampingan secara intensif	Memadai	3	4	12

Tabel 3. Daftar Risiko Prioritas

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5	6
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan					
1	Pembuangan air limbah produksi ke badan air	16	Kepala DLHK	Kurangnya perhatian pelaku usaha/kegiatan terhadap pengolahan limbah yang tepat	Kondisi kualitas sungai tidak sesuai baku mutu air
2	Pencemaran udara berasal dari aktivitas industri	16	Kepala DLHK	Kurangnya perhatian pelaku usaha/kegiatan terhadap pengolahan emisi gas buang dalam proses produksi	Gas buang yang dihasilkan dapat mempengaruhi iklim global, termasuk peningkatan suhu dan perubahan cuaca ekstrem
3	Degradasi lahan	16	Kepala DLHK	Gangguan keamanan hutan seperti pengundulan hutan dan kebakaran hutan	Menurunnya produktivitas dan daya dukung lahan
4	Konversi habitas alami spesies	16	Kepala DLHK	Perubahan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya dan pemukiman	Kehilangan keanekaragaman hayati
5	Penebangan hutan secara berlebihan	16	Kepala DLHK	Adanya Ketimpangan antara pasokan dan permintaan bahan baku kayu	Terhambatnya produktivitas dan nilai tambah hasil hutan
6	Lambatnya pelayanan terhadap masyarakat	16	Kepala DLHK	Keterbatasan kapasitas SDM tenaga teknis	Terjadi penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
7	Adanya benturan kepentingan	15	Kepala DLHK	Belum optimalnya pengelolaan risiko di DLHK	Penurunan tingkat integritas
Sekretariat					
8	Pelaksanaan program/kegiatan tidak tepat sasaran	12	Sekretaris Dinas	Kurang optimalnya pengawasan dalam proses perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Target kinerja OPD tidak tercapai
9	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	12	Sekretaris Dinas	Kurang optimalnya pengawasan Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Terhambatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan
10	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	15	Sekretaris Dinas	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup					
11	Penurunan daya dukung lingkungan	16	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kurangnya Prioritas Isu Lingkungan Hidup Dalam Visi Misi Kepala Daerah	Perbaikan kualitas lingkungan hidup berjalan statis
12	Penyusunan program kerja tidak sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup	16	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Personil di daerah tidak memahami pentingnya program green leadership	Pengelolaan lingkungan tidak efektif dan efisien
13	Rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat mengatasi dampak	16	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kurangnya informasi data yang perlu dilengkapi dalam penyusunan dokumen	Pengelolaan lingkungan tidak efektif dan efisien
14	Proses persetujuan lingkungan tidak dapat dilanjutkan	16	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Substansi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan tidak mendapatkan persetujuan lingkungan atas usaha/kegiatan
15	Keterlambatan penerbitan rekomendasi dan persetujuan lingkungan	16	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kualitas dokumen lingkungan belum sesuai ketentuan	Proses penerbitan rekomendasi dan persetujuan lingkungan tidak sesuai SOP
16	Upaya peningkatan kapasitas kepedulian lingkungan hidup tidak efektif	16	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Belum optimalnya sinergitas para pihak dalam upaya peningkatan kapasitas kepedulian lingkungan hidup	Masih adanya pencemaran terhadap lingkungan hidup
17	Sekolah tidak mematuhi standar yang ditetapkan dalam rencana gerakan PBLHS	16	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kurangnya pemahaman sekolah terhadap regulasi tentang Sekolah Adiwiyata	Sekolah tidak lolos seleksi calon sekolah adiwiyata
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup					
18	Masih adanya pencemaran sungai yang belum tertangani	16	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kurang optimalnya sinergitas antar stakeholder dalam pengendalian pencemaran air	Menurunnya kualitas sungai

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
19	Masih adanya pencemaran udara di Kab/Kota yang belum tertangani	16	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kurang optimalnya sinergitas antar stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara	Menurunnya kualitas udara ambien
20	Pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan	16	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Frekuensi pembinaan tidak sebanding jumlah usaha dan/atau kegiatan yang harus dilakukan pembinaan	Target jumlah usaha/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu tidak tercapai
21	Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kerentanan lokasi	16	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam identifikasi kerentanan terhadap perubahan iklim	Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan ikim yang dilaksanakan tidak berdampak pada penurunan emisi grk
22	Eksploitasi keanekaragaman hayati	16	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kurangya informasi terkait regulasi pengelolaan keanekaragaman hayati	Hilangnya keanekaragaman hayati
23	Pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati tidak merata	16	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Keterbatasan informasi lokasi pelestarian keanekaragaman hayati	Target luas lokasi pelestarian keanekaragaman hayati yang ditangani tidak tercapai
24	Masih adanya Limbah B3 yang belum tertangani	16	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kurang optimalnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	Terjadinya Pencemaran Limbah B3 ke Lingkungan di Jawa Tengah
25	Penugasan personil yang tidak kompeten	16	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kurangnya Pemahaman dan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	Limbah B3 tidak terkelola

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
26	Pengelolaan sampah di Jawa Tengah belum terpadu	16	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Implementasi road map sampah belum optimal	Tidak tercapainya target Persentase sampah yang terkelola
27	Keterlambatan pembangunan TPST Regional	16	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Readiness Criteria Pembangunan TPST regional tidak terpenuhi	Sampah tidak tertangani
Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan					
28	Kekeliruan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan pengelolaan hutan	16	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	Adanya ketidaksinkronan antara sumber yang satu dengan yang lain	Kerusakan kawasan hutan
29	Kesalahan dalam menganalisa data untuk bahan pertimbangan	16	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	Perubahan data terkait perijinan atau pemanfaatan hutan di tingkat Pusat sangat cepat sehingga mempengaruhi analisa data	Data yang tertuang dalam Pertimbangan teknis tidak sesuai dengan kondisi lapangan terkini
30	Pelaku usaha melanggar ketentuan dalam kontrak kerja/PKS	16	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	Pemegang ijin PPKH tidak melaksanakan kewajiban atas pemberian ijin pemanfaatan kawasan hutan	Ijin usaha atau kerjasama pemanfaatan kawasan hutan tidak diperpanjang
31	Unit pengolahan HHBK tidak berkembang	16	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	Kurangnya informasi pengembangan serta pemasaran hasil hutan bukan kayu	Pengolahan hhbk belum berdampak bagi kesejahteraan masyarakat
32	Unit pengolahan hasil hutan kayu tidak berkembang	16	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	Industri dan masyarakat kurang mengetahui kondisi dan potensi hutan rakyat di Jawa Tengah	Terhambatnya investasi
33	Penentuan prioritas peningkatan kelas KTH tidak konsisten dan tidak tepat sasaran	16	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	Ketidaksesuaian antara dokumen penyuluhan dengan implementasi kegiatan	Target prioritas KTH tidak tercapai
34	Konflik internal KTH	16	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	Pergantian pengurus KTH	Penurunan etos kerja KTH dalam kelola kelembagaan, kawasan dan usaha

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam					
35	Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak tepat berada pada lahan kritis	16	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kurangnya komitmen dalam penentuan lokasi RHL	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tidak berimbas pada upaya penurunan luas lahan kritis
36	Pelaksanaan rehabilitasi hutan/lahan tidak sesuai sasaran RURHL	16	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Usulan lokasi RHL kurang sesuai dengan sasaran RURHL	Upaya peningkatan luas tutupan lahan kurang optimal
37	Masih ada TSL kewenangan provinsi yang tidak dilindungi	16	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kurangnya peraturan daerah tentang perlindungan TSL tidak dilindungi	Menurunnya keanekaragaman hayati
38	Potensi kerusakan ekosistem calon areal preservasi	16	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Belum tersedianya data kawasan yang berpotensi ditetapkan areal preservasi	Kehilangan keanekaragaman hayati
39	Data TSL kewenangan provinsi belum mutakhir	16	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	kurangnya kompetensi SDM prov dan kab/kota dalam mengidentifikasi TSL kewenangan provinsi	Tidak terkoordinirnya perencanaan perlindungan TSL dalam satu kesatuan wilayah provinsi Jateng
40	Belum seluruh pihak terkait melaksanakan rencana aksi Pengelolaan KBEP	16	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kurangnya komitmen pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan KBEP	KBEP belum memberikan manfaat optimal secara ekologi maupun ekonomi
41	Penanganan DAS Prioritas tidak tepat berada pada lahan kritis	16	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kurangnya pemahaman, keterlibatan dan komitmennya para pemangku kepentingan/stakeholders	Pelaksanaan penanganan DAS tidak berimbas pada upaya penurunan luas lahan kritis
42	Keterbatasan kewenangan DLHK dalam pengelolaan DAS	16	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terdapat perbedaan peraturan dan persepsi antara pihak terkait	Pengelolaan DAS tidak optimal

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan					
43	Kegiatan pencemaran tidak termonitor	16	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	Personel tidak memahami teknis pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan	Meningkatnya pencemaran lingkungan
44	Petugas berpotensi memanipulasi data hasil pengawasan	15	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	Benturan kepentingan antara petugas dengan pelaku usaha	Usaha yang dijalankan tidak sesuai aturan
45	Aduan tidak dapat ditindaklanjuti	16	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	Aduan tidak memuat informasi lengkap/terinci	Target Aduan yang ditindaklanjuti tidak tercapai
46	Aduan pencemaran lingkungan tidak terbukti	16	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	Kondisi lingkungan yang berubah ketika verifikasi lapangan	Aduan tidak terselesaikan & terjadi pengaduan ulang perihal yang sama
47	Keterbatasan kewenangan DLHK Provinsi Jateng dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan	16	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	Intervensi penanganan perlindungan dan pengaman sesuai Tugas Fungsi DLHK Prov. Jateng sudah diatur dalam pergub SOTK	Gangguan keamanan hutan tidak terkendali
48	Adanya kejadian gangguan keamanan hutan yang tidak terlaporkan	16	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	Keterbatasan jumlah penyuluh di CDK untuk melakukan monev perlindungan hutan	Kurang optimalnya penanganan kasus perlindungan hutan
Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup					
49	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	15	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara
50	Penurunan jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan hidup	16	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	Regulasi untuk parameter kualitas air yang harus diuji tidak lagi harus 1 (satu) paket tetapi diambil parameter kunci atau yang memiliki dampak terbesar/signifikan	Realisasi jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan hidup tidak tercapai
51	Kegagalan pengambilan sampel kualitas lingkungan hidup	16	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	Pengambilan sampel air dan udara tidak memenuhi syarat atau ditunda/batal karena terbatasnya parameter pengujian	Berkurangnya jumlah titik uji/unit kualitas udara sesuai target/rencana sampling.

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
52	Pengurangan jumlah parameter uji yang masuk ruang lingkup akreditasi dan/atau registrasi laboratorium lingkungan	16	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	Tidak terpenuhinya jaminan mutu dan/atau pengendalian mutu parameter pengujian laboratorium yang terakreditasi dan/atau teregistrasi	Penurunan kepercayaan pelanggan
Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan					
53	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	15	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara
54	Pelayanan fasilitasi bibit terbatas pada jenis bibit tertentu yang ada di persemaian/kebun	12	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Keterbatasan jenis bibit yang diproduksi	Target distribusi bibit kepada masyarakat tidak tercapai
52	Petugas memanipulasi data verifikasi	15	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Benturan kepentingan antara petugas dengan pelaku usaha	Usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tidak sesuai aturan
Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A					
53	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	15	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara
54	Pengelolaan kawasan konservasi tahura belum ada acuan	16	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	Proses penyusunan Rencana Pengelolaan Tahura belum selesai	Pengelolaan tahura tidak berjalan optimal
55	Gangguan keamanan hutan	16	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	Kurang keterlibatan masyarakat dalam pengamanan tahura	Peningkatan kerusakan kawasan tahura
56	Kurang minatnya masyarakat terhadap Pemanfaatan Jasa lingkungan Tahura	16	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	Kurangnya daya tarik kawasan tahura	Kontribusi tahura tidak mencapai target PAD
57	Restorasi Kawasan tidak sesuai sasaran	16	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	Pelaksanaan RHL belum optimal	Masih adanya lahan kritis

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B					
58	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	15	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara
59	Koleksi tumbuhan tidak terpelihara	16	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	Belum optimalnya pemeliharaan koleksi tumbuhan	Berkurangnya koleksi tumbuhan Kebun Raya Baturraden
60	Pembukaan vak koleksi tumbuhan di Kebun Raya Baturraden tidak terlaksana	16	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	Terhambatnya ijin penebangan pohon untuk pembukaan vak koleksi tumbuhan	Target unit pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden tidak tercapai sehingga tumbuhan hasil eksplorasi tidak dapat ditanam
61	Terjadinya kehilangan/kerusakan koleksi tumbuhan Kebun Raya Baturraden	16	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	Akses masuk ke Kebun Raya Baturraden sangat terbuka	Pemanfaatan koleksi tumbuhan tidak optimal
62	Jenis tumbuhan yang dilestarikan tidak dapat teridentifikasi dengan tepat	16	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	Registrasi Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden belum optimal	Perlakuan terhadap jenis tumbuhan tidak tepat
Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I-XI					
63	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	15	CDK I-XI	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara
64	Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak tepat berada pada lahan kritis	16	CDK I-XI	Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan kurang memperhatikan lokasi lahan kritis	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tidak berimbas pada upaya penurunan luas lahan kritis
65	Telambatnya penanganan kebakaran hutan	16	CDK I-XI	Keterbatasan Sarpras Karhutla	Meluasnya kebakaran hutan dan sulit ditangani

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
66	Wilayah kerja penyuluh terlalu luas dibandingkan jumlah penyuluh yang ada	16	CDK I-XI	Keterbatasan jumlah penyuluh di CDK	Kurang intensifnya penyuluh dalam melakukan pendampingan/konsultansi terkait HHBK
67	Masyarakat kurang mendukung upaya rehabilitasi hutan/lahan	16	CDK I-XI	Adanya pemanfaatan lahan untuk kepentingan lainnya oleh masyarakat	Luasan hutan yang direhabilitasi kurang terpenuhi
68	Rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat menjadi MPA dan MMP	16	CDK I-XI	Kurangnya komitmen masyarakat untuk terlibat menjadi MPA dan MMP	Penanganan perlindungan hutan tidak sesuai dengan ketentuan
69	Fasilitasi sarana dan prasarana budidaya HHBK tidak terpakai (mangkrak)	16	CDK I-XI	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan Sarana dan prasarana budidaya HHBK	HHBK tidak dapat diolah
70	Pelanggaran aturan dalam pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu	16	CDK I-XI	Industri banyak yang belum berijin, Kurangnya tenaga pembinaan industri pengolahan hasil hutan	Terganggunya kinerja dan keberlanjutan industri pengolahan hasil hutan kayu
71	Belum semua pihak terkait bersedia mengambil peran dalam perencanaan perlindungan TSL	16	CDK I-XI	Perbedaan kepentingan serta keterbatasan kewenangan untuk menangani TSL	Menurunnya keanekaragaman hayati
72	Belum seluruh pihak terkait melaksanakan rencana aksi Pengelolaan KBEP	16	CDK I-XI	Kurangnya komitmen pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan KBEP	KBEP belum memberikan manfaat optimal secara ekologi maupun ekonomi
73	Data TSL belum mutakhir	16	CDK I-XI	Keterbatasan kapasitas SDM dan sarpras dalam mengidentifikasi TSL	Tidak diketahuinya potensi dan sebaran TSL
74	Tidak terpantauan pelaksanaan pengelolaan KBEP sesuai rencana aksi	16	CDK I-XI	Kurangnya pemahaman SDM terhadap metode monev pengelolaan KBEP	KBEP tidak terkelola dengan baik
75	KTH tidak ada perkembangan aktivitas	16	CDK I-XI	Kurangnya dukungan kelompok masyarakat dalam kelembagaan KTH	Peningkatan kesejahteraan masyarakat belum signifikan
76	Bukti dukung kegiatan kelompok tidak dapat disampaikan pada saat penilaian kelas KTH	16	CDK I-XI	Tidak berjalannya kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha kelompok	Tidak meningkatnya kelas kelompok

Tabel 4. Rencana Tindak Pengendalian

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan									
1	Menurunnya pencemaran air permukaan	Indeks pencemaran air	Pembuangan air limbah produksi ke badan air	16	Kurangnya perhatian pelaku usaha/kegiatan terhadap pengolahan limbah yang tepat	Kondisi kualitas sungai tidak sesuai baku mutu air	- Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian pencemaran air - Mengoordinasikan penanganan pengaduan dan pengawasan terhadap industri yang membuang limbah ke badan air	Kepala DLHK	TW I, II, III, IV
2	Menurunnya pencemaran udara	Kualitas udara pada konsentrasi SO2 dan NO2	Pencemaran udara berasal dari aktivitas industri	16	Kurangnya perhatian pelaku usaha/kegiatan terhadap pengolahan emisi gas buang dalam proses produksi	Gas buang yang dihasilkan dapat mempengaruhi iklim global, termasuk peningkatan suhu dan perubahan cuaca ekstrem	-Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian pencemaran udara - Mengoordinasikan inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan - Mengoordinasikan partisipasi publik dalam pengendalian pencemaran udara dan percepatan pembentukkan program kampung iklim - Mengoordinasikan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Kepala DLHK	TW I, II, III, IV
3	Meningkatnya kualitas lahan	Luas tutupan lahan	Degradasi lahan	16	Gangguan keamanan hutan seperti pengundulan hutan dan kebakaran hutan	Menurunnya produktivitas dan daya dukung lahan	- Mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk kawasan mangrove - Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan hutan terhadap kerusakan hutan	Kepala DLHK	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
4	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Konversi habitas alami spesies	16	Perubahan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya dan pemukiman	Kehilangan keanekaragaman hayati	- Mendorong percepatan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati dan implementasinya - Mengoordinasikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya - Perlindungan kawasan konservasi, Kawasan Ekosistem Esensial dan Cagar Biosfir	Kepala DLHK	TW I, II, III, IV
5	Meningkatnya kapasitas produksi hasil hutan	Pertumbuhan produksi hasil hutan	Penebangan hutan secara berlebihan	16	Adanya Ketimpangan antara pasokan dan permintaan bahan baku kayu	Terhambatnya produktivitas dan nilai tambah hasil hutan	- Mengoordinasikan Pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu - Mendorong pengembangan sistem sertifikasi legalitas hasil hutan - Penyediaan pelatihan teknis dan bantuan sarpras pengembangan hasil hutan bukan kayu	Kepala DLHK	TW I, II, III, IV
6	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Lambatnya pelayanan terhadap masyarakat	16	Keterbatasan kapasitas SDM tenaga teknis	Terjadi penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	- Mengoptimalkan layanan perizinan dan pengaduan berbasis aplikasi - Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas dan optimalisasi SDM yang ada saat ini	Kepala DLHK	TW I, II, III, IV
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Adanya benturan kepentingan	15	Belum optimalnya pengelolaan risiko di DLHK	Penurunan tingkat integritas	- Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan penganggaran - Penguatan sistem pengendalian internal perangkat daerah - Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas dan optimalisasi SDM dalam pengelolaan risiko	Kepala DLHK	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
Sekretariat									
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan program/kegiatan tidak tepat sasaran	12	Kurang optimalnya pengawasan dalam proses perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Target kinerja OPD tidak tercapai	Meningkatan koordinasi para pihak dalam proses perencanaan dan evaluasi	Sekretaris Dinas	TW I, II, III, IV
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak sesuai dengan standar layanan	12	Kurang optimalnya pengawasan Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Terhambatnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Melakukan survey kepuasan internal dalam rangka meningkatkan pengawasan Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Sekretaris Dinas	TW II dan IV
10	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	15	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara	Pengadaan lewat e-purchasing	Sekretaris Dinas	TW I, II, III, IV
Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup									
11	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	Penurunan daya dukung lingkungan	16	Kurangnya Prioritas Isu Lingkungan Hidup Dalam Visi Misi Kepala Daerah	Perbaikan kualitas lingkungan hidup berjalan statis	Menerbitkan SK Gub. Tentang Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
12	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup	Penyusunan program kerja tidak sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup	16	Personil di daerah tidak memahami pentingnya program green leadership	Pengelolaan lingkungan tidak efektif dan efisien	Sosialisasi dan Penguatan Kab/Kota serta Tim Penyusun OPD tentang Juknis Penyusunan Dokumen DIKPLHD	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
13	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi	Rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat mengatasi dampak	16	Kurangnya informasi data yang perlu dilengkapi dalam penyusunan dokumen	Pengelolaan lingkungan tidak efektif dan efisien	Peningkatan Kapasitas SDM Penyusun dan Validator KLHS	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
14	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	Proses persetujuan lingkungan tidak dapat dilanjutkan	16	Substansi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelaku usaha dan/atau kegiatan tidak mendapatkan persetujuan lingkungan atas usaha/kegiatan	Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam proses persetujuan lingkungan	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
15	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan	Keterlambatan penerbitan rekomendasi dan persetujuan lingkungan	16	Kualitas dokumen lingkungan belum sesuai ketentuan	Proses penerbitan rekomendasi dan persetujuan lingkungan tidak sesuai SOP	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
16	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	Upaya peningkatan kapasitas kepedulian lingkungan hidup tidak efektif	16	Belum optimalnya sinergitas para pihak dalam upaya peningkatan kapasitas kepedulian lingkungan hidup	Masih adanya pencemaran terhadap lingkungan hidup	Melaksanakan rapat koordinasi dan perumusan komitmen bersama terkait upaya peningkatan kapasitas kepedulian lingkungan hidup	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
17	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya	Sekolah tidak mematuhi standar yang ditetapkan dalam rencana gerakan PBLHS	16	Kurangnya pemahaman sekolah terhadap regulasi tentang Sekolah Adiwiyata	Sekolah tidak lolos seleksi calon sekolah adiwiyata	Meningkatkan frekuensi dan intensitas pembinaan Instansi terkait (DLH, Kemenag, Disdik Kab/Kota) dalam upaya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup									
18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	Masih adanya pencemaran sungai yang belum tertangani	16	Kurang optimalnya sinergitas antar stakeholder dalam pengendalian pencemaran air	Menurunnya kualitas sungai	Koordinasi dengan kab/kota untuk mengusulkan lokasi stasiun pemantau kualitas sungai secara real time	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
19	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	Masih adanya pencemaran udara di Kab/Kota yang belum tertangani	16	Kurang optimalnya sinergitas antar stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara	Menurunnya kualitas udara ambien	Komitmen bersama stakeholder terkait dalam meningkatkan kualitas udara ambien dan sharing session proklim dengan materi yang terencana secara berkala	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
20	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	Pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan	16	Frekuensi pembinaan tidak sebanding jumlah usaha dan/atau kegiatan yang harus dilakukan pembinaan	Target jumlah usaha/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu tidak tercapai	Meningkatkan koordinasi internal berkaitan dengan upaya penegakan hukum bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan dalam persetujuan lingkungan	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
21	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penurunan emisi grk di tingkat tapak	Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kerentanan lokasi	16	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam identifikasi kerentanan terhadap perubahan iklim	Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan ikim yang dilaksanakan tidak berdampak pada penurunan emisi grk	Pendampingan secara intensif dan berkala dalam identifikasi kerentanan perubahan iklim	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
22	Program Pengelolaan Keanekaragakan Hayati (KEHATI)	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	Eksploitasi keanekaragaman hayati	16	Kurangya informasi terkait regulasi pengelolaan keanekaragaman hayati	Hilangnya keanekaragaman hayati	Penyebarluasan informasi regulasi pengelolaan kehati secara massif	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
23	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani	Pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati tidak merata	16	Keterbatasan informasi lokasi pelestarian keanekaragaman hayati	Target luas lokasi pelestarian keanekaragaman hayati yang ditangani tidak tercapai	Koordinasi dan sinkronisasi pembaruan data luas pelestarian kehati yang ditangani di Jawa Tengah	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
24	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	Masih adanya Limbah B3 yang belum tertangani	16	Kurang optimalnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	Terjadinya Pencemaran Limbah B3 ke Lingkungan di Jawa Tengah	Peningkatan pemahaman kebijakan Pengelolaan Limbah B3 secara intensif dan periodik	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
25	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola	Penugasan personil yang tidak kompeten	16	Kurangnya Pemahaman dan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	Limbah B3 tidak terkelola	Menjadi Konsulting partner bagi pelaku usaha dan Kab/Kota dalam pengelolan Limbah B3	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
26	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	Pengelolaan sampah di Jawa Tengah belum terpadu	16	Implementasi road map sampah belum optimal	Tidak tercapainya target Persentase sampah yang terkelola	Meningkatkan sinergitas antar stakeholder dalam Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
27	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah tertangani	Keterlambatan pembangunan TPST Regional	16	Readiness Criteria Pembangunan TPST regional tidak terpenuhi	Sampah tidak tertangani	Meningkatkan sinergitas antar stakeholder dalam pemenuhan RC TPST Regional Magelang	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan									
28	Program Pengelolaan Hutan	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	Kekeliruan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan pengelolaan hutan	16	Adanya ketidaksinkronan antara sumber yang satu dengan yang lain	Kerusakan kawasan hutan	1. Melaksanakan FGD Reviu RKTP se Jawa Tengah 2. Melaksanakan verifikasi lapangan	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	TW I, II, III, IV
29	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen penatagunaan kawasan hutan	Kesalahan dalam menganalisa data untuk bahan pertimbangan	16	Perubahan data terkait perijinan atau pemanfaatan hutan di tingkat Pusat sangat cepat sehingga mempengaruhi analisa data	Data yang tertuang dalam Pertimbangan teknis tidak sesuai dengan kondisi lapangan terkini	1.melakukan koordinasi (Rapat, kunjungan koordinasi) dengan instansi terkait mengenai perkembangan data dan informasi kawasan hutan dan hutan rakyat secara berkala (bulanan) 2. Melakukan cek lapangan Data Dukung: Nota Dinas, dokumentasi, Peta	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	TW I, II, III, IV
30	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah dokumen data informasi pemanfaatan hutan	Pelaku usaha melanggar ketentuan dalam kontrak kerja/PKS	16	Pemegang ijin PPKH tidak melaksanakan kewajiban atas pemberian ijin pemanfaatan kawasan hutan	Ijin usaha atau kerjasama pemanfaatan kawasan hutan tidak diperpanjang	1. Koordinasi dan Rekonsiliasi data kewajiban Pemegang PPKH dengan stake holder terkait; 2. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan kewajiban bagi pemegang PPKH	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	TW I, II, III, IV
31	Kegiatan Pelaksanaan (HHBK) Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang	Unit pengolahan HHBK tidak berkembang	16	Kurangnya informasi pengembangan serta pemasaran hasil hutan bukan kayu	Pengolahan hhbk belum berdampak bagi kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas FGD pengembangan hhbk	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	TW I, II, III, IV
32	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan	Unit pengolahan hasil hutan kayu tidak berkembang	16	Industri dan masyarakat kurang mengetahui kondisi dan potensi hutan rakyat di Jawa Tengah	Terhambatnya investasi	Mengoptimalkan peran penyuluh dalam Pembinaan/pendampingan kepada pelaku usaha	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
33	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	Penentuan prioritas peningkatan kelas KTH tidak konsisten dan tidak tepat sasaran	16	Ketidaksesuaian antara dokumen penyuluhan dengan implementasi kegiatan	Target prioritas KTH tidak tercapai	Dukungan kebijakan pimpinan dalam implementasi dokumen penyuluhan yang telah disusun	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	TW I, II, III, IV
34	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya	Konflik internal KTH	16	Pergantian pengurus KTH	Penurunan etos kerja KTH dalam kelola kelembagaan, kawasan dan usaha	Mengoptimalkan peran penyuluh kehutanan untuk melakukan mediasi terhadap kelompok masyarakat yang berkonflik	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan	TW I, II, III, IV
Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam									
35	Program Pengelolaan Hutan	Persentase lahan kritis tertangani	Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak tepat berada pada lahan kritis	16	Kurangnya komitmen dalam penentuan lokasi RHL	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tidak berimbas pada upaya penurunan luas lahan kritis	Berkomitmen dalam kegiatan RHL	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	TW I, II, III, IV
36	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove)	Pelaksanaan rehabilitasi hutan/lahan tidak sesuai sasaran RURHL	16	Usulan lokasi RHL kurang sesuai dengan sasaran RURHL	Upaya peningkatan luas tutupan lahan kurang optimal	Koordinasi dan pencermatan ulang terhadap Perubahan peta RURHL dari KLHK	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
37	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	Masih ada TSL kewenangan provinsi yang tidak dilindungi	16	Kurangnya peraturan daerah tentang perlindungan TSL tidak dilindungi	Menurunnya keanekaragaman hayati	Menyusun kajian dalam rangka pengaturan perlindungan TSL	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	TW I, II, III, IV
38	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	Potensi kerusakan ekosistem calon areal preservasi	16	Belum tersedianya data kawasan yang berpotensi ditetapkan areal preservasi	Kehilangan keanekaragaman hayati	Melaksanakan kegiatan pendataan calon areal preservasi	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	TW I, II, III, IV
39	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani	Data TSL kewenangan provinsi belum mutakhir	16	kurangnya kompetensi SDM prov dan kab/kota dalam mengidentifikasi TSL kewenangan provinsi	Tidak terkoordinirnya perencanaan perlindungan TSL dalam satu kesatuan wilayah provinsi Jateng	Menyusun pedoman identifikasi TSL proiritas kewenangan provinsi	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	TW I, II, III, IV
40	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Pengendalian pengelolaan KBEP	Belum seluruh pihak terkait melaksanakan rencana aksi Pengelolaan KBEP	16	Kurangnya komitmen pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan KBEP	KBEP belum memberikan manfaat optimal secara ekologi maupun ekonomi	Surat Edaran Sekda berupa himbauan terkait optimalisasi pelaksanaan rencana pengelolaan KBEP	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
41	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	Penanganan DAS Prioritas tidak tepat berada pada lahan kritis	16	Kurangnya pemahaman, keterlibatan dan komitmennya para pemangku kepentingan/stakeholders	Pelaksanaan penanganan DAS tidak berimbas pada upaya penurunan luas lahan kritis	Sinergitas Stakeholders dalam Pengelolaan DAS	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	TW I, II, III, IV
42	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya	Keterbatasan kewenangan DLHK dalam pengelolaan DAS	16	Terdapat perbedaan peraturan dan persepsi antara pihak terkait	Pengelolaan DAS tidak optimal	FGD dengan pihak terkait	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	TW I, II, III, IV
Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan									
43	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	Kegiatan pencemaran tidak termonitor	16	Personel tidak memahami teknis pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan	Meningkatnya pencemaran lingkungan	Mengusulkan pelaksanaan kegiatan peningkatan Kapasitas Kab/Kota kepada BPSDMD Prov. Jawa Tengah	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	TW I, II, III, IV
44	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha berijin yang taat	Petugas berpotensi memanipulasi data hasil pengawasan	15	Benturan kepentingan antara petugas dengan pelaku usaha	Usaha yang dijalankan tidak sesuai aturan	Mengusulkan kegiatan sosialisasi anti korupsi secara rutin	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	TW I, II, III, IV
45	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang ditangani	Aduan tidak dapat ditindaklanjuti	16	Aduan tidak memuat informasi lengkap/terinci	Target Aduan yang ditindaklanjuti tidak tercapai	Sosialisasi Prosedur pengaduan yang baik dan benar melalui Sosial Media	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
46	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah laporan aduan yang ditangani	Aduan pencemaran lingkungan tidak terbukti	16	Kondisi lingkungan yang berubah ketika verifikasi lapangan	Aduan tidak terselesaikan & terjadi pengaduan ulang perihal yang sama	Sosialisasi Prosedur pengaduan yang baik dan benar melalui Sosial Media	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	TW I, II, III, IV
47	Program Pengelolaan Hutan	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	Keterbatasan kewenangan DLHK Provinsi Jateng dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan	16	Intervensi penanganan perlindungan dan pengaman sesuai Tugas Fungsi DLHK Prov. Jateng sudah diatur dalam pergub SOTK	Gangguan keamanan hutan tidak terkendali	Sinkronisasi program perlindungan dan pengamanan hutan bersama pihak terkait	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	TW I, II, III, IV
48	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan	Adanya kejadian gangguan keamanan hutan yang tidak terlaporkan	16	Keterbatasan jumlah penyuluh di CDK untuk melakukan monev perlindungan hutan	Kurang optimalnya penanganan kasus perlindungan hutan	Peningkatan kapasitas Penyuluh kehutanan dan PKSM terkait monev perlindungan hutan	Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan	TW I, II, III, IV
Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup									
49	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan BPL2H	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	15	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara	Pengadaan lewat e-purchasing	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
50	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup	Penurunan jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan hidup	16	Regulasi untuk parameter kualitas air yang harus diuji tidak lagi harus 1 (satu) paket tetapi diambil parameter kunci atau yang memiliki dampak terbesar/signifikan	Realisasi jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan hidup tidak tercapai	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dan Audit Internal	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
51	Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik /sampel pada lokasi pemantauan kualitas lingkungan hidup	Kegagalan pengambilan sampel kualitas lingkungan hidup	16	Pengambilan sampel air dan udara tidak memenuhi syarat atau ditunda/batal karena terbatasnya parameter pengujian	Berkurangnya jumlah titik uji/unit kualitas udara sesuai target/rencana sampling.	Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pengjian yang tidak dapat dilakukan oleh BPL2H	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
52	Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan	Pengurangan jumlah parameter uji yang masuk ruang lingkup akreditasi dan/atau registrasi laboratorium lingkungan	16	Tidak terpenuhinya jaminan mutu dan/atau pengendalian mutu parameter pengujian laboratorium yang terakreditasi dan/atau teregistrasi	Penurunan kepercayaan pelanggan	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dan Audit Internal	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	TW I, II, III, IV
Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan									
53	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan BSPTH	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	15	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara	Pengadaan lewat e-purchasing	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	TW I, II, III, IV
54	Program Pengelolaan Hutan	Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	Pelayanan fasilitasi bibit terbatas pada jenis bibit tertentu yang ada di persemaian/kebun	12	Keterbatasan jenis bibit yang diproduksi	Target distribusi bibit kepada masyarakat tidak tercapai	Menambah produksi MPTS dengan eksplorasi mandiri	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	TW I, II, III, IV
55	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH	Petugas memanipulasi data verifikasi	15	Benturan kepentingan antara petugas dengan pelaku usaha	Usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tidak sesuai aturan	Mengusulkan kegiatan sosialisasi anti korupsi secara rutin	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A									
56	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan TAHURA	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	15	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara	Pengadaan lewat e-purchasing	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	TW I, II, III, IV
57	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan	Pengelolaan kawasan konservasi tahura belum ada acuan	16	Proses penyusunan Rencana Pengelolaan Tahura belum selesai	Pengelolaan tahura tidak berjalan optimal	Peningkatan koordinasi stakeholder dalam rangka melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen pengukuhan tahura	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	TW I, II, III, IV
58	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura	Gangguan keamanan hutan	16	Kurang keterlibatan masyarakat dalam pengamanan tahura	Peningkatan kerusakan kawasan tahura	Sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat peduli Api dalam pengamanan kawasan tahura	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	TW I, II, III, IV
59	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Pemanfaatan Jasa lingkungan	Kurang minatnya masyarakat terhadap Pemanfaatan Jasa lingkungan Tahura	16	Kurangnya daya tarik kawasan tahura	Kontribusi tahura tidak mencapai target PAD	Sosialisasi jasa Lingkungan	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	TW I, II, III, IV
60	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah luas kawasan yang bernilai kehati tinggi	Restorasi Kawasan tidak sesuai sasaran	16	Pelaksanaan RHL belum optimal	Masih adanya lahan kritis	Kolaborasi dengan stakeholder terkait (LSM Relung) untuk kegiatan RHL	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B									
61	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan TAHURA	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	15	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara	Pengadaan lewat e-purchasing	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	TW I, II, III, IV
62	Program Pengelolaan Keanekaragakan Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden	Koleksi tumbuhan tidak terpelihara	16	Belum optimalnya pemeliharaan koleksi tumbuhan	Berkurangnya koleksi tumbuhan Kebun Raya Baturraden	Melaksanakan inspeksi dan pemeliharaan koleksi tumbuhan secara periodik	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	TW I, II, III, IV
63	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden	Pembukaan vak koleksi tumbuhan di Kebun Raya Baturraden tidak terlaksana	16	Terhambatnya ijin penebangan pohon untuk pembukaan vak koleksi tumbuhan	Target unit pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden tidak tercapai sehingga tumbuhan hasil eksplorasi tidak dapat ditanam	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	TW I, II, III, IV
64	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden	Terjadinya kehilangan/kerusakan koleksi tumbuhan Kebun Raya Baturraden	16	Akses masuk ke Kebun Raya Baturraden sangat terbuka	Pemanfaatan koleksi tumbuhan tidak optimal	Sosialisasi kepada masyarakat secara berkala dan memperbanyak media informasi/himbauan terkait pengamanan koleksi tumbuhan	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	TW I, II, III, IV
65	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di Kebun Raya Baturraden	Jenis tumbuhan yang dilestarikan tidak dapat teridentifikasi dengan tepat	16	Registrasi Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden belum optimal	Perlakuan terhadap jenis tumbuhan tidak tepat	Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	TW I, II, III, IV
Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I-XI									
66	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan TAHURA	Barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi	15	Terdapat KKN dalam pengadaan barang	Merugikan negara	Pengadaan lewat e-purchasing	CDK I-XI	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
67	Program Pengelolaan Hutan	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK I-XI	Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak tepat berada pada lahan kritis	16	Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan kurang memperhatikan lokasi lahan kritis	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tidak berimbas pada upaya penurunan luas lahan kritis	Koordinasi dan konsultasi penentuan lokasi prioritas penanganan lahan kritis bersama instansi terkait	CDK I-XI	TW I, II, III, IV
68	Program Pengelolaan Hutan	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK I-XI	Telambatnya penanganan kebakaran hutan	16	Keterbatasan Sarpras Karhutla	Meluasnya kebakaran hutan dan sulit ditangani	Pengajuan permohonan fasilitasi sarpras karhutla melalui CSR	CDK I-XI	TW I, II, III, IV
69	Program Pengelolaan Hutan	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK I-XI	Wilayah kerja penyuluh terlalu luas dibandingkan jumlah penyuluh yang ada	16	keterbatasan jumlah penyuluh di CDK	Kurang intensifnya penyuluh dalam melakukan pendampingan/konsultansi terkait HHBK	Menstimulasi masyarakat untuk membudidayakan tanaman HHBK dengan baik dan benar melalui kunjungan studi tiru ke KTH yang telah berhasil menerapkan budidaya HHBK yang baik dan benar	CDK I-XI	TW I, II, III, IV
70	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK I-XI	Masyarakat kurang mendukung upaya rehabilitasi hutan/lahan	16	Adanya pemanfaatan lahan untuk kepentingan lainnya oleh masyarakat	Luasan hutan yang direhabilitasi kurang terpenuhi	Membuat komitmen bersama masyarakat pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	CDK I-XI	TW I, II, III, IV
71	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK I-XI	Rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat menjadi MPA dan MMP	16	Kurangnya komitmen masyarakat untuk terlibat menjadi MPA dan MMP	Penanganan perlindungan hutan tidak sesuai dengan ketentuan	Pendampingan intensif dan Sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan tokoh masyarakat	CDK I-XI	TW I, II, III, IV
72	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang CDK I-XI	Fasilitasi sarana dan prasarana budidaya HHBK tidak terpakai (mangkrak)	16	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan Sarana dan prasarana budidaya HHBK	HHBK tidak dapat diolah	Sosialisasi/bimtek kepada penerima bantuan pasca menerima sarana dan prasarana budidaya HHBK	CDK I-XI	TW I, II, III, IV
73	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan CDK I-XI	Pelanggaran aturan dalam pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu	16	Industri banyak yang belum berijin, Kurangnya tenaga pembinaan industri pengolahan hasil hutan	Terganggunya kinerja dan keberlanjutan industri pengolahan hasil hutan kayu	Monitoring dan evaluasi industri pengolahan hasil hutan dengan memaksimalkan peran personel pengawas/pembina industri pengolahan hasil hutan yang ada	CDK I-XI	TW I, II, III, IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian (Triwulan)
74	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK I-XI	Belum semua pihak terkait bersedia mengambil peran dalam perencanaan perlindungan TSL	16	Perbedaan kepentingan serta keterbatasan kewenangan untuk menangani TSL	Menurunnya keanekaragaman hayati	Sosialisasi mengenai pentingnya pengendalian dan pengawasan TSL yang tidak dilindungi	CDK I-XI	TW I, II, III, IV
75	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK I-XI	Belum seluruh pihak terkait melaksanakan rencana aksi Pengelolaan KBEP	16	Kurangnya komitmen pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan KBEP	KBEP belum memberikan manfaat optimal secara ekologi maupun ekonomi	Perumusan peraturan pengelolaan KBEP bersama pihak terkait	CDK I-XI	TW I, II, III, IV
76	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani CDK I-XI	Data TSL belum mutakhir	16	Keterbatasan kapasitas SDM dan sarpras dalam mengidentifikasi TSL	Tidak diketahuinya potensi dan sebaran TSL	Melaksanakan sosialisasi SOP dan Kanal Pengaduan Konflik TSL	CDK I-XI	TW I, II, III, IV
77	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola CDK I-XI	Tidak terpantauan pelaksanaan pengelolaan KBEP sesuai rencana aksi	16	Kurangnya pemahaman SDM terhadap metode monev pengelolaan KBEP	KBEP tidak terkelola dengan baik	Melaksanakan bimbingan teknis/workshop terkait potensi pemanfaatan KBEP dan monev pengelolaan KBEP	CDK I-XI	TW I, II, III, IV
78	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK I-XI	KTH tidak ada perkembangan aktivitas	16	Kurangnya dukungan kelompok masyarakat dalam kelembagaan KTH	Peningkatan kesejahteraan masyarakat belum signifikan	Koordinasi dengan stakeholder terkait pendidikan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	CDK I-XI	TW I, II, III, IV
79	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK I-XI	Bukti dukung kegiatan kelompok tidak dapat disampaikan pada saat penilaian kelas KTH	16	Tidak berjalannya kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha kelompok	Tidak meningkatnya kelas kelompok	Studi Tiru antar kelompok dalam lingkup CDK untuk kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha	CDK I-XI	TW I, II, III, IV

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk jangka menengah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades) Provinsi Jawa Tengah memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong kemandirian desa, dan memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam dinamika pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil di Jawa Tengah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang terstruktur dan komprehensif menjadi krusial sebagai panduan utama acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dispermades Provinsi Jawa Tengah untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Dokumen ini bukan sekadar representasi administratif, melainkan cetak biru yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan pemberdayaan masyarakat, desa, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dispermades Provinsi Jawa Tengah Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2021. Renstra PD disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dispermades menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kependudukan dan pencatatan sipil serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan dari, oleh dan

untuk masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri. Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksessibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan *leading* sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat, desa, dan kependudukan dan pencatatan sipil yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Jawa Tengah sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiskinan.

Penyusunan Renstra 2025-2029 ini diselenggarakan dengan melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya, selain itu juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2030 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok.

Tahapan dalam penyusunan Renstra PD sebagai berikut:

1. ***Persiapan Penyusunan***, meliputi:
   1) Pembentukan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan oleh Gubernur, disusun dan dikoordinasikan oleh Bappeda;
   2) Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk tim penyusun teknis lingkup perangkat daerah sekaligus menjadi tim penyelenggara Forum PD.
   3) Orientasi mengenai Renstra PD;
   4) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;
   5) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
2. ***Penyusunan Rancangan***, mencakup:

   Tahap I

   1) Penyusunan pohon kinerja;

2) *Cascading* PD; dan
3) Manajemen risiko PD;

Tahap II penyusunan dokumen Renstra PD

1) Analisis gambaran pelayanan;
2) Analisis permasalahan;
3) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4) Analisis isu strategis;
5) Perumusan tujuan dan sasaran PD beserta indikator serta target kinerja;
6) Perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD;
7) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD;
8) Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD.

3. Pelaksanaan Forum PD

4. Perumusan Rancangan Akhir, mencakup:

1) Rumusan rancangan akhir direviu oleh APIP;
2) Rancangan akhir Renstra PD dilakukan penyempurnaan berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan;
3) Rancangan akhir Renstra disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan bahan masukan penyempurnaan Renstra PD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar dalam penyusunan dokumen Renstra harus memiliki hubungan yang sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Baik di Daerah, antar Daerah maupun dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional.

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

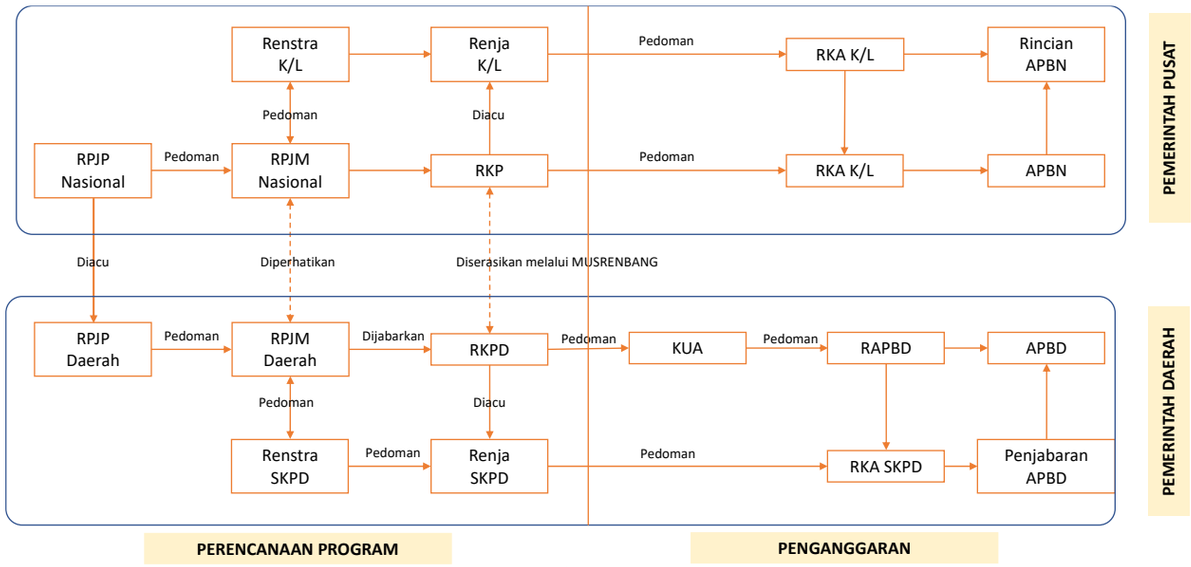

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen Lainnya

Dokumen Renstra PD merupakan dokumen yang sangat strategis dan sangat terkait dengan berbagai kebijakan, diantaranya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang di perbaharui dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. Landasan hukum penyusunan Renstra Dispermades Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4) Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7) Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2017 tentang Administrasi Kependudukan;
14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

19) Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah;
20) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah;
21) Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
22) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dispermades tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dispermades Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut :

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah **"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan Dan Transformasi Sosial Didukung Tata Kelola Berkelanjutan".**
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dispermades untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dispermasdes.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur pada Dispermades dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dispermades yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Susunan dan sistematikan Renstra PD berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang menginstruksikan untuk penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir. Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dispermades Tahun 2025-2029.

Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dispermades

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Dispermades, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan Dispermades, identifikasi permasalahan beserta hambatan-hambatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dispermades, telaah tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, telaah Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta perumusan isu strategis.

Bab III : Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan Dispermades

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta rencana tindak pengendalian risiko Dispermades.

Bab IV : Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kinerja penyelenggaraan Bidang urusan.

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci Dispermades.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

Renstra PD dilengkapi dengan:

1) Pohon Kinerja;
2) Cascading Perangkat Daerah;
3) Manajemen Risiko.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.1. Struktur Organisasi Dispermades

Dispermades dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah maka susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah terdiri atas bidang-bidang dan Pokja sesuai dengan Rancangan Peraturan Gubernur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
   a) Sub Bagian Program;
   b) Sub Bagian Kuangan;
   c) Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
3. Bidang Penataan dan Regulasi Desa;
   a) Kelompok Kerja Penataan dan Perkembangan Desa.
   b) Kelompok Kerja Fasilitasi Regulasi Desa.
4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
   a) Kelompok Kerja Perencanaan dan Keuangan Desa.
   b) Kelompok Kerja Pengelolaan Aset Desa.
   c) Kelompok Kerja Pembinaan Pemerintahan Desa.
5. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa;
   a) Kelompok Kerja Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan.
   b) Kelompok Kerja Pengembangan Ekonomi Desa.
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   a) Kelompok Kerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
   b) Kelompok Kerja Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Partisipasi Masyarakat.
7. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
   a) Kelompok Kerja Fasilitasi Pendaftaran Penduduk.
   b) Kelompok Kerja Fasilitasi Pencatatan Sipil.
   c) Kelompok Kerja Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

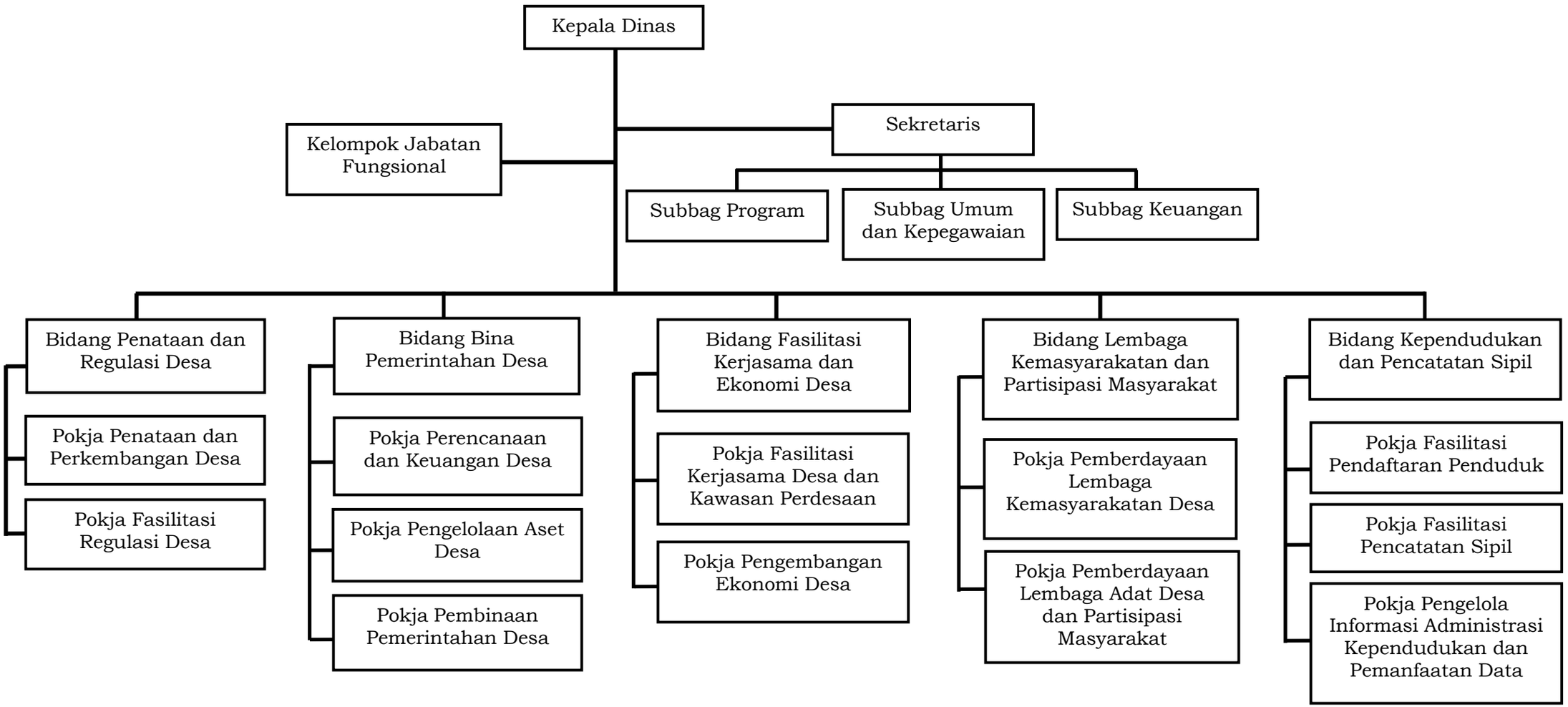

2.1.2. Uraian Tugas

Uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dispermades menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang penataan dan regulasi desa, bina pemerintahan desa, fasilitasi kerjasama dan ekonomi desa, lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat serta kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan regulasi desa, bina pemerintahan desa, fasilitasi kerjasama dan ekonomi desa, lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat serta kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan regulasi desa, bina pemerintahan desa, fasilitasi kerjasama dan ekonomi desa, lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat serta kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat melaksanakan fungsi:

a) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
b) Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
c) Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
d) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
e) Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
f) Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
g) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah Daerah;
h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan

i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Penataan dan Regulasi Desa

Bidang Penataan Desa dan Regulasi Desa memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan regulasi desa. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Penataan Desa melaksanakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan pelaksanaaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang Penataan dan Regulasi Desa;
b) Pelaksanaan kebijakan pelaksanaaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang Penataan dan Regulasi Desa
c) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pelaksanaaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang Penataan dan Regulasi Desa
d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang Penataan dan Regulasi Desa
e) Pelaporan dan rekomendasi pelaksanaaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang Penataan dan Regulasi Desa; dan
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina pemerintahan desa. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Bina Pemerintahan Desa melaksanakan fungsi :

a) perumusan kebijakan Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Pemerintahan Desa;
b) pelaksanaan kebijakan Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Pemerintahan Desa;
c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Pemerintahan Desa;
d) monitoring dan evaluasi Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Pemerintahan Desa;
e) pelaporan dan rekomendasi Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Pemerintahan Desa; dan
f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa

Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,evaluasi dan pelaporan dibidang kerjasama dan ekonomi desa. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa melaksanakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Ekonomi Desa;
b) Pelaksanaan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Ekonomi Desa;
c) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Ekonomi Desa;
d) Monitoring dan evaluasi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Ekonomi Desa;
e) Pelaporan dan rekomendasi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Ekonomi Desa; dan
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat melaksanakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Pengembangan TTG dan Partisipasi Masyarakat;
b) Pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Pengembangan TTG dan Partisipasi Masyarakat;
c) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Pengembangan TTG dan Partisipasi Masyarakat;
d) Monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Pengembangan TTG dan Partisipasi Masyarakat;
e) Pelaporan dan rekomendasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Pengembangan TTG dan Partisipasi Masyarakat; dan
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan koordinasi, evaluasi serta pelaporan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b) Pelaksanaan kebijakan koordinasi, evaluasi serta pelaporan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan koordinasi, evaluasi serta pelaporan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d) Monitoring dan evaluasi koordinasi, evaluasi serta pelaporan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e) Pelaporan dan rekomendasi koordinasi, evaluasi serta pelaporan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah berjumlah 108 orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dispermades Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SD Sederajat	1	0	0	0	1
2.	SMP Sederajat	1	0	0	0	1
3.	SMA Sederajat	4	1	3	0	8
4.	D3	3	3	1	0	7
5.	S1	21	30	12	13	76
6.	S2	11	4	0	0	15
Jumlah		**41**	**38**	**16**	**13**	**108**

Sumber: Dispermades Provinsi Jawa Tengah tahun 2025

Berdasarkan data di atas Pegawai Dispermades Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan Sarjana dan magister. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur Dispermades dari segi pendidikan bagus. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
di Dispermades Prov. Jateng Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	4	2	6
3.	Golongan III	29	29	58
4.	Golongan IV	6	2	8
Jumlah		**39**	**33**	**72**

Sumber: Dispermades Provinsi Jawa Tengah tahun 2025

Berdasarkan data di atas sebagian besar Pegawai Dispermades Provinsi Jawa Tengah adalah pegawai golongan III dan IV.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menunjang kinerja dinas, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dispermades Provinsi Jawa Tengah terlihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Volume
di Dispermades Tahun 2025
(Gedung dan Kendaraan Bermotor)

No	Jenis Aset	Volume
1.	Luas Tanah	5.027 m2
2.	Gedung A Lt I, II dan III	2.646 m2
3.	Gedung Instalasi Hidrant	110 m2
4.	Gedung Pos Jaga	16 m2
5.	Gedung Instalasi Genset	14 m2
6.	Gedung Garasi, UPM dan Arsip	384 m2
7.	Rumah Genset	15 m2
8.	Gedung B	384 m2
9.	Gedung C	384 m2
10.	Gedung Mushola	500 m2
11.	Gedung D	60 m2
12.	Kendaraan Bermotor Roda 2	15 unit
13.	Kendaraan Bermotor Roda 4	15 unit

Sumber: Dispermades Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dari segi volume aset berupa tanah, gedung dan kendaraan bermotor cukup memadai dengan kondisi secara keseluruhan baik. Dari aspek ketercukupan prasarana dan sarana, prasarana dan sarana tersebut cukup untuk menunjang tugas dan fungsi yang diemban oleh Dispermades.

Sedangkan aset peralatan kantor sebagai penunjang kinerja Dispermades digambarkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jumlah Aset Peralatan Kantor Berdasarkan Kondisi
di Dispermades Tahun 2025

No	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Genset	√		4 unit
2.	AC	√		82 unit
3.	Pemadam Kebakaran	√		29 buah
4.	Penghacur Kertas	√		11 buah
5.	Brankas	√		2 buah
6.	Filling Kabinet	√		79 buah
7.	Hidrant Kebakaran	√		1 buah
8.	Jaringan Internet dan LAN/WAN	√		2 buah
9.	Jam Dinding	√		12 buah
10.	Kursi Besi	√		69 buah
11.	Kursi Kayu	√		17 buah
12.	Kursi lipat	√		35 buah
13.	Kursi Rapat	√		266 buah
14.	Kursi Kerja Pegawai	√		30 buah
15.	Kursi Putar	√		238 buah
16.	Kursi Tamu	√		8 buah
17.	Meja Kantor	√		6 buah
18.	Meja Kursi	√		26 buah
19.	Meja ½ Biro	√		2 buah
20.	Meja Kerja Pegawai	√		93 buah
21.	Meja Eselon II dan III	√		6 buah
22.	Meja Komputer	√		55 buah
23.	Meja Panjang	√		2 buah
24.	Meja Rapat	√		115 buah
25.	Meja Resepsion	√		1 buah
26.	Meja Tambahan	√		4 buah
27.	Meja Tamu	√		15 buah
28.	Meja Telepon	√		1 buah
29.	Meja Makan	√		1 buah
30.	Meja Tulis	√		54 buah
31.	Server	√		4 buah
32.	Komputer	√		118 unit
33.	Printer	√		116 unit
34.	UPS		√	79 unit
35.	Scanner	√		5 buah
36.	Note Book	√		35 buah
37.	Podium	√		3 buah
38.	Almari Kayu	√		30 buah
39.	Almari Kaca	√		8 buah
40.	Lemari Es	√		5 buah
41.	Lemari Arsip	√		10 buah
42.	Lemari besi	√		19 buah
43.	Rak arsip	√		87 buah
44.	Rak Buku	√		2 buah
45.	Rak kayu	√		32 buah
46.	Rak Besi	√		11 buah
47.	Sofa	√		6 set
48.	Televisi	√		28 buah
49.	Tiang Bendera	√		1 buah

No	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
50.	Amplifier	√		4 unit
51.	Kamera Digital	√		7 buah
52.	Audio Conference	√		36 buah
53.	DVD Player	√		1 buah
54.	Facimile		√	2 buah
55.	Handy Talky	√		5 buah
56.	Microvision Motorized Screen	√		2 buah
57.	Speaker	√		9 buah
58.	LCD Proyektor	√		11 buah
59.	Layar Proyektor	√		25 buah
60.	Sound System	√		7 buah
61.	Wireless Microphone	√		4 buah
62.	Power Supply Microphone	√		24 buah
63.	Telepon (PABX)	√		2 buah
64.	Mesin Fotocopy	√		1 buah
65.	Mesin Ketik	√		2 buah
66.	Copy Board	√		1 buah
67.	Papan Pengumuman	√		1 buah
68.	Papan Visuit	√		1 buah
69.	Sice	√		3 buah
70.	Timbangan Barang	√		1 buah
71.	Vacuum Cleaner	√		1 buah
72.	Router	√		2 buah
73.	Mesin Penghitung Uang	√		1 buah
74.	Laptop	√		4 buah
75.	Stabilisator	√		2 buah
76.	Mesin Absensi	√		3 buah
77.	Dispenser	√		2 buah
78.	Digitizer	√		14 buah
79.	Connector	√		8 buah
80.	Tablet PC	√		2 buah
81.	Papan Nama Instansi	√		1 buah
82.	Drone	√		1 buah

Sumber: Dispermades Provinsi Jawa Tengah tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa aset sarana prasarana kantor Dispermades mencukupi dari segi jumlah jika dibandingkan dengan jumlah pegawai, dari segi kondisi aset sarana prasarana kantor mayoritas berada dalam kondisi yang baik. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana kantor Dispermades sangat mencukupi mendukung kinerja pegawai.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dispermades dapat diuraikan sebagai berikut. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispermades Provinsi Tahun 2018-2024 terlihat pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Dispermades Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dispermades					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Tujuan**																			
1	Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah	%				1,55	1,79	2,69	2,88		1,79	2,55	5,20	-		115,484	142,458	193,309		
2	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah	%				100	100	100	100		100	100	100	-		100	100	100		
3	Meningkatkan tatakelola organisasi perangkat daerah	Angka				65	70	75	80		83,75	84,25	84,36	-		128,846	120,357	112,48		
B	**Sasaran**																			
1	Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah	%				40,50	48,57	65,71	68		48,57	63,82	82,27	-		119,94	131,39	125,19		
2	Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan	%				100	100	100	100		100	100	100	-		100	100	100		
3	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Angka				82,50	84,50	86,50	88,50		78,15	79,59	81,32	-		94,73	94,19	94,01		
4	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Angka				77,81	78,81	79,81	80,81		83,75	84,25	84,36	-		107,63	106,90	105,70		
C	**Program**																			
1	**Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah**																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100	100	100	100		100					100				
2	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																			
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100	100	100	100		100					100				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dispermades					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	**Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa**																			
	Presentase rekomendasi raperda/raperbup yang berkaitan dengan desa	%				100	100	100	100		100					100				
	Persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	%				37,06	63,86	81,93	100		39,16					105,66				
	Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa	%				11,81	25,38	32,81	40,24		11,81					100				
	Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	%				2,63	3,45	3,89	4,34		-					97,33				
	Persentase jumlah rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum	%				100	100	100	100		100					100				
4	**Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan**																			
	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	%				52,54	67,12	83,56	100		52,54					100				
	Persentase desa yang mengembangkan LKD/BKAD	%				2,60	4,46	5,57	6,68		2,61					100,49				
5	**Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat**																			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi	%				42,76	54,71	63,16	71,61		48,84					114,23				
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	%				2,22	2,85	3,20	3,55		2,50					112,75				
6	**Penataan Administrasi Kependudukan**																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dispermades					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per wajib KTP-el	%				100	100	100	100		99					99				
	Tingkat partisipasi penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%				95	95	97	100		96					101,05				
	Cakupan OPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%				40	60	80	100		96					240				
Permendagri 90 tahun 2020																				
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																			
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%					100					100					100			
2	**Program Pendaftaran Penduduk**																			
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per wajib KTP-el	%					100					98,18					98,18			
3	**Program Pencatatan Sipil**																			
	Tingkat partisipasi penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%					95					95,15					100,16			
4	**Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan**																			
	Cakupan Instansi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%					60					120					200			
5	**Program Penataan Desa**																			
	Persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	%					63,86					44,58					69,81			
	Presentase rekomendasi	%					100					100					100			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dispermades					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Raperda/Raperbup yang berkaitan dengan Desa																			
	Persentase jumlah rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum	%					100					100					100			
	Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa	%					25,38					13,66					53,83			
	Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	%					3,45					12,86					373,11			
6	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**																			
	Persentase desa yang mengembangkan LKD/BKAD	%					4,46					3,01					67,53			
	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	%					67,12					50,68					75,51			
7	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**																			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	%					54,71					68,05					124,39			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	%					2,85					2,85					100			
Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021																				
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%						100	100				100					100		
	Persentase ketercapaian nilai SAKIP Dispermades	%						100	100				100					100		
2	**Program Pendaftaran Penduduk**																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dispermades					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per wajib KTP-el	%						100	100				98,16					98,16		
3	**Program Pencatatan Sipil**																			
	Tingkat partisipasi penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%						97	100				99,97					103,06		
4	**Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan**																			
	Cakupan Instansi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%						80	100				148					185		
5	**Program Penataan Desa**																			
	Persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	%						81,93	100				62,65					76,47		
6	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**																			
	Persentase desa yang mengembangkan LKD/BKAD	%						5,57	6,68				4,37					78,45		
	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	%						83,56	100				80,82					96,72		
7	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**																			
	Presentase rekomendasi tukar menukar tanah kas Desa	%						100	100				100					100		
	Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	%						3,89	4,34				19,62					503,88		
	Presentase Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa	%						32,81	40,24				44,43					135,42		
	Presentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa	%						100	100				100					100		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dispermades					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**																			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	%						63,16	71,61				80,16					126,93		
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	%						3,20	3,55				3,11					97,15		
Renstra PD Tahun 2024-2026																				
A	**Tujuan**																			
1	Meningkatkan Desa Mandiri	%								0,7318					0,7485					102
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%								4					4					100
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Angka								70					74,43					106
B	**Sasaran**																			
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Jawa Tengah	%								11,84					19,58					165
2	Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%								89					91,27					103
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Angka								84,75					84,5					99,7
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Nilai								3					2,5					83

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dispermades					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C	**Program**																			
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah**																			
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								90					75					83,33
2	**Program Pendaftaran Penduduk**																			
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%								97					99,04					102,1
3	**Program Pencatatan Sipil**																			
	Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%	%								97					94,29					97,21
4	**Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan**																			
	Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%								33,33					0					0
5	**Program Penataan Desa**																			
	Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa	%								100					0					0
6	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**																			
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	%								100					100					100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dispermades					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	%								100					100					100
7	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**																			
	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	%								25,42					27,4					107,77
8	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**																			
	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%								9,39					36,19					385,33
	Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	%								100					100					100
	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	%								100					100					100

Sumber: Dispermades Provinsi Jawa Tengah tahun 2025

Dari tabel 2.5. diatas pencapaian kinerja Dispermades Prov. Jateng pada masa Renstra 2024-2026, dimana secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) **Indikator Tujuan**
   a) **Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah** mempunyai target Nilai IDM Provinsi hingga akhir tahun 2026 sebesar 0,8018, pada tahun 2024 capaiannya sebesar 0,7486, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 92,21%.
   b) **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** mempunyai target Nilai level Provinsi Jawa Tengah hingga akhir tahun 2026 sebesar nilai 4, pada tahun 2024 mendapatkan nilai 4, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.
   c) **Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah** mempunyai target nilai pada akhir tahun 2026 sebesar 75, pada tahun 2024 mendapatkan nilai 74,43, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 ini sebesar 99,24%.
2) **Indikator Sasaran**
   a) **Peningkatan kemandirian Desa di Jawa Tengah** mempunyai target Persentase peningkatan jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah hingga akhir tahun 2026 sebesar 8,08% (631 Desa Mandiri), pada tahun 2024 telah tercapai 19,59% (1.350 Desa Mandiri), dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 213,95%.
   b) **Meningkatkan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah** mempunyai target hingga akhir tahun 2026 sebesar 78,25%, pada tahun 2024 tercapai 91,27%, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 120,09%.
   d) **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah** mempunyai target pada akhir tahun 2026 sebesar 3, pada tahun 2024 mendapatkan nilai 2,503, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 ini sebesar 83,43%.
   e) **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** mempunyai target nilai pada akhir tahun 2023 sebesar 85,25, pada tahun 2024 mendapatkan nilai 84,50, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 ini sebesar 99,12%.
3) **Indikator Program**
   a) **Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah** mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 100%, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 100%, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.
   b) **Persentase tingkat ketercapaian kinerja Dispermades** mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 100%, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 75%, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 75%.
   c) **Persentase penduduk yang memiliki KTP-el** mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 99%, realisasi sampai dengan tahun 2024

tercapai 99,04%, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 100,04%.

d) **Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%** mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 100%, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 94,29%, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 97,21%.
e) **Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan** mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 100%, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 0%, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 0%.
f) **Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa** mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 100%, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 0%, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 0%.
g) **Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa** mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 100%, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 100%, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.
h) **Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa** mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 100%, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 100%, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.
i) **Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)** mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 100%, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 27,4%, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 27,4%.
j) **Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah** mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 11,67%, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 36,19%, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 310,11%.
k) **Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya** mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 100%, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 100%, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.
l) **Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)** mempunyai target sampai akhir tahun 2026 sebesar 100%, realisasi sampai dengan tahun 2024 tercapai 100%, dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.

Kemudian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dilihat dari aspek anggaran dan realisasi penyerapan pendanaan dapat dilihat pada tabel 2.6. sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispermades
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah																						
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	400.000	425.000	450.000	475.000		352.655					323.604					91,76					-1,03	-0,22
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	105.000	115.000	125.000	135.000		23.000					22.808					99,17					-57,41	-57,52
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000		825.000					663.724					80,45					-7,04	-9,21
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	120.000	125.000	125.000	130.000		94.410					93.414					98,95					-7,63	-7,57
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.850.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000		1.486.241					1.479.247					99,53					2,99	3,98
6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	900.000	950.000	950.000	1.000.000		276.770					276.531					99,91					-36,87	-35,22
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	250.000	300.000	325.000	350.000		85.740					85.737					100					-34,23	-34,23

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	25.000	25.000	25.000	25.000		5.540					5.540					100					-46,06	-46,06
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	2.150.000	2.250.000	2.350.000	2.500.000		852.075					850.638					99,83					-37,51	-36,13
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	400.000	425.000	450.000	450.000		85.000					85.921					101,08					-55,84	-55,37
11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	900.000	1.000.000	1.050.000	1.200.000		403.570					403.567					100					-30,03	-28,46
12	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	2.000.000	-	-	-		-					-					-					-100	- 100
13	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	175.000	175.000	175.000	175.000		1.510					-					-					-97,51	- 100
14	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	200.000	200.000	200.000	200.000		30.000					29.745					99,15					-53,85	-53,97
15	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	400.000	450.000	500.000	500.000		22.512					22.493					99,91					-81,81	-81,31
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	550.000	600.000	600.000	700.000		109.085					108.317					99,30					-46,67	-44,43
17	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi	550.000	600.000	600.000	700.000		104.190					101.616					97,53					-55,5	-54,5

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Kinerja Perangkat Daerah																					9	3
	Penataan Administrasi Kependudukan																						
18	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.725.000	1.750.000	1.800.000	2.000.000		333.228					294.476					88,37					-66,81	-68,38
19	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000		292.280					274.347					93,86					-65,46	-66,27
20	Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.100.000		351.020					325.545					92,74					-69,92	-71,09
	Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa																						
21	Kegiatan Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Keluarahan di Jawa Tengah	800.000	950.000	1.000.000	1.100.000		317.299					313.903					98,93					-40,54	-39,77
22	Kegiatan Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Database Bidang Pemerintahan Desa	850.000	900.000	1.000.000	1.050.000		244.440					241.490					98,79					-53,19	-53,42
23	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa di Jawa Tengah	750.000	850.000	950.000	1.000.000		284.198					283.948					99,91					-39,16	-39,15
24	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah	700.000	900.000	1.000.000	1.000.000		213.002					212.974					99,99					-53,34	-53,33

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/ Kelurahan	1.900.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000		650.857					648.733					99,67					-34,94	-34,64
	Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan																						
26	Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa di Jawa Tengah	800.000	900.000	900.000	1.050.000		239.746					239.603					99,94					-42,90	-42,91
27	Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan	1.750.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000		575.980					574.915					99,82					-47,06	-46,93
	Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat																						
28	Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna di Jawa Tengah	5.600.000	5.600.000	5.900.000	6.100.000		2.902.961					2.422.193					83,44					13	4,18
29	Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Jawa Tengah	2.250.000	2.250.000	2.350.000	2.450.000		692.181					673.243					97,26					-38,26	-38,02
30	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.750.000		496.890					371.754					74,82					-46,19	-56,65
	Total	**34.150.000**	**33.940.000**	**35.475.000**	**37.490.000**		**12.351.380**					**11.430.026**					**92,54**					**-36,14**	**-37,70**
Permendagri 90 tahun 2020																							

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																						
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
1	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan							179.020					167.810					93,74					
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah							77.000					69.693					90,51					
	Administrasi Keuangan																						
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							12.119.458					11.464.059					94,59					
4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan							351.000					348.000					99,15					
	Administrasi Umum																						
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							6.700					4.928					73,55					
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							728.600					630.024					86,47					
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							1.098.210					1.083.247					98,64					
8	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah							94.250					92.460					98,10					
9	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor							407.900					404.332					99,13					
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							462.231					443.247					95,89					

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							144.250					141.190					97,88					
12	Penyediaan Makanan dan Minuman							82.500					82.498					100					
13	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah							200.000					199.646					99,82					
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor							1.068.500					1.047.335					98,02					
15	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							174.950					170.355					97,37					
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor							72.760					72.156					99,17					
	PROGRAM PENATAAN DESA																						
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat																						
17	Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat							170.000					169.222					99,54					
18	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat							197.500					196.440					99,46					
	Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat							235.000					234.220					99,67					
	PROGRAM PENATAAN DESA																						
	Penatausahaan Penetapan Susunan																						

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat																						
19	Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat							349.500					349.499					100					
20	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat							325.500					324.440					99,67					
21	Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat							695.000					690.464					99,35					
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA																						
	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi																						
22	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota							600.000					594.351					99,06					
23	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga							220.000					218.249					99,20					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																						
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa																						

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota																						
24	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat							735.000					713.725					97,11					
25	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan							585.000					540.191					92,34					
26	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							1.896.000					1.738.494					91,69					
27	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna							200.000					189.899					94,95					
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																						
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan																						
28	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi							760.000					681.400					89,66					
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL																						
	Pelayanan Pencatatan Sipil																						
29	Fasilitasi PelayananBidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota							681.355					600.736					88,17					
	PROGRAM																						

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																						
	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi																						
30	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan							770.000					689.505					89,55					
	Total							**25.687.184**					**24.351.814**					**94,80**					
Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021																							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								195.000	447.214				194.183	446.883				99,58	99,93		39,27	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								95.000	120.000				93.810	119.525				98,75	99,60		11,63	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								11.650.092	13.673.690				11.514.944	12.776.069				98,84	93,44		12,58	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								355.000	361.280				349.147	351.680				98,35	97,34		2,74	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								4.000	5.000				4.000	5.000				100	100		11,11	

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																						
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								94.000	91.680				91.998	91.498				97,87	99,80		3,09	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor								7.500	11.000				7.500	10.999				100	99,9		-	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								18.500	74.000				18.449	74.000				99,72	100		60,43	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								48.800	82.000				47.952	82.000				98,26	100		25,38	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								80.000	90.022				79.978	90.006				99,97	99,98		-	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								40.000	52.550				39.908	52.479				99,77	99,87		-	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								15.000	11.250				15.000	11.250				100	100		-	
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu								86.950	114.325				86.947	114.305				100	99,98		6,98	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								225.000	343.618				224.697	342.062				99,87	99,55		13,29	
15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								100.000	131.237				99.413	130.520				99,41	99,45		4,76	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau									617.000					564.830					91,54		100	

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Kendaraan Dinas Jabatan																						
17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								-	26.500				-	26.400				-	99,62		100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								8.000	8.000				6.870	7.546				85,88	99,84		-	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								652.560	500.92				635.412	499.698				97,37	99,75		-8,75	
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								20.000	38.084				19.945	38.081				99,73	99,99		20	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								1.394.188	1.496.854				13.933	1.495.309				1	99,90		3,25	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								96.700	189.050				86.595	187.667				89,55	99,27		28,82	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								40.000	57.050				39.664	57.018				99,16	99,94		11,11	
24	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								25.000	18.00				24.733	18.000				98,93	100		-16,28	
25	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								-	30.500					30.500					100		100	
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								166.502	177.072				162.458	176.968				97,57	99,94		20,05	
27	Pemeliharaan/Rehabilita								47.8	41.0				47.7	40.8				99,8	99,7		-	

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								00	00				07	75				1	0		15,46	
	PROGRAM PENATAAN DESA																						
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat																						
28	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat								200.000	200.000				199.308	196.983				99,65	98,49		-	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																						
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																						
29	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ walikota yang Mengatur Desa								200.000	300.000				198.790	299.312				99,40	99,77		20	
30	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan								100.000	200.000				99.699	198.762				99,70	99,38		33,33	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																						
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																						
31	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa								300.000	75.000				299.936	74.850				99,98	99,80		-	

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
32	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								-	300.000					297.601					99,20		100	
33	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD								100.000	70.000				99.260	69.365				99,26	99,09		-17,65	
34	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis								675.000	750.000				673.847	744.908				99,83	99,32		5,26	
35	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota								400.000	386.000				398.163	385.587				99,54	99,89		-	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA																						
	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi																						
36	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota								200.000	225.000				199.932	224.947				99,97	99,98		5,88	
37	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan								600.000	835.000				598.714	832.149				99,79	99,66		7,69	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																						
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa																						

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota																						
38	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								200.000	250.000				199.543	247.432				99,77	98,97		11,11	
39	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Posyandu)								-	75.000				-	73.616				-	98,15		100	
40	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa								1.950.000	1.685.000				1.927.401	1.677.444.902				98,84	99,55		-7,29	
41	Fasilitasi Pemerintah								136.	115.				124.	114.				91,2	99,9		-8,57	

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								550	000				548	941				1	5			
42	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat								150.000	165.000				149.414	164.950				99,61	99,97		4,76	
43	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga								525.000	645.490				517.496	643.087				98,57	99,63		2,33	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																						
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan																						
44	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi								263.076	255.000				259.383	254.156				98,60	99,67		-1,56	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL																						
	Pelayanan Pencatatan Sipil																						
45	Fasilitasi PelayananBidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota								255.161	235.000				253.724	234.389				99,44	99,74		-4,11	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																						
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi																						

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
46	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan								273.503	310.000				270.739	309.897				98,99	99,97		6,25	
	Total								**21.993.882**	**26.367.473**				**20.375.139**	**24.885.561**	**-**			**92,64**	**96,14**		**9,04**	
	Renstra 2024-2026																						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					522.830					300.000					299.931					99,98		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					200.000					130.000					129.257					99,43		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					13.052.643					13.812.227					13.423.319					97,18		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					385.000					375.000					357.240					95,26		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																						
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					120.000					100.000					94.403					94,40		
	Administrasi Kepegawaian																						

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Perangkat Daerah																						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					120.000					45.240					44.544					98,46		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					11.000					10.000					9.985					99,85		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					120.000					70.000					62.710					89,59		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					85.000					75.000					75.000					100		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					85.000					75.000					74.789					99,72		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					40.000					10.438					10.437					100		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					15.000					5.000					5.000					100		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					120.000					100.000					99.990					99,99		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					400.000					329.000					328.970					99,99		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					120.000					100.000					99.697					99,70		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000					259.480					259.48					100		

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																0							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					575.000					653.600					530.051					81,10		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					45.000					30.000					29.938					99,79		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.670.000					1.644.290					1.595.204					97,01		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					300.000					242.000					205.861					85,07		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					75.000					40.000					39.991					99,98		
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					35.000					20.000					19.920					99,60		
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					75.000					30.000					29.298					97,66		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					350.000					221.000					219.510					99,33		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000					35.000.000					34.930					99,80		
	PROGRAM ADMINISTRASI																						

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	PEMERINTAHAN DESA																						
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																						
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ walikota yang Mengatur Desa										330.000					328.420					99,52		
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan										348.170					327.248					93,99		
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa										50.000					47.928					95,86		
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																						
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																						
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa										25.000					24.831					99,33		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa										50.000					49.705					99,41		
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa										250.000					249.003					99,60		
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis										500.000					494.747					98,95		
	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi										200.000					199.98					99,99		

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota															2							
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA																						
	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi																						
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga										200.000					199.755					99,88		
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan										475.000					473.555					99,70		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																						
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota																						
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan										225.000					224.50					99,78		

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															4							
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										50.000					49.001					98,00		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa										525.000					520.387					99,12		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna										186.055					184.667					99,25		
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat										100.000					99.916					99,92		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga										2.300.000					2.283.296					99,27		

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																						
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan																						
	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi										240.000					239.118					99,63		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL																						
	Pelayanan Pencatatan Sipil																						
	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi										220.000					216.483					98,40		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																						
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi																						
	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										240.000					235.835					98,26		

Sumber: Dispermades Provinsi Jawa Tengah tahun 2025

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan merupakan tahapan penting dalam proses merumuskan isu-isu strategis. Tahapan yang sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah pada Dispermades. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral serta etika birokrasi. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan sesuai dengan tupoksi Dispermades Provinsi Jawa Tengah. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan di Jawa Tengah	1. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang kurang memadai	1) Kurang cakapnya SDM pelayanan Admindukcapil 2) Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai 3) Rendahnya keamanan data kependudukan
	2. Belum optimalnya pengelolaan data dan Informasi Kependudukan	1) Rendahnya tingkat partisipasi dalam pencatatan peristiwa kependudukan 2) Validitas dan akurasi data serta informasi yang belum optimal
	3. Rendahnya pemanfaatan data kependudukan	Rendahnya pemahaman pentingnya pemanfaatan data kependudukan
2. Rendahnya Desa Mandiri di Jawa Tengah	1. Keterbatasan akses layanan dasar Desa	1) Masih belum meratanya akses layanan dasar di Desa 2) Masih rendahnya kualitas penyediaan layanan dasar
	2. Rendahnya intensitas sosial dan budaya masyarakat di Desa	1) Lemahnya pelestarian sosial dan budaya masyaraka 2) Rendahnya aktifitas sosial masyarakat
	3. Rendahnya Pendapatan Asli Desa (PADes)	1) Kualitas/mutu hasil produksi unggulan ekonomi desa yang masih minim 2) Sarana dan prasarana usaha yang kurang memadai di Desa 3) Kualitas BUMDes yang masih rendah 4) Belum optimalnya fungsi pasar desa 5) kerjasama Desa dengan pihak ke-3/antar Desa yang masih rendah
	4. kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana di Desa masih rendah	1) Rendahnya kesadaran kelestarian lingkungan hidup 2) Rendahnya pengelolaan kelestarian lingkungan hidup 3) Lemahnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	5. Rendahnya aksesbilitas di Desa	1) Infrastruktur Aksesibilitas Desa yang belum memadai 2) Akses wilayah Desa yang terbatas
	6. Masih rendahnya kualitas tata kelola Pemerintahan Desa	1) Kompetensi SDM aparatur desa yang masih lemah 2) Infrastruktur pendukung Pemerintahan Desa yang kurang memadai 3) Kolaborasi kelembagaan Desa yang masih rendah 4) Perencanaan pembangunan Desa yang belum optimal 5) Rendahnya pelayanan masyarakat 6) Rendahnya tertib administrasi Desa 7) Produk hukum yang mengatur Desa yang belum optimal 8) Akuntabilitas pengelolaan aset Desa yang masih rendah 9) Pengelolaan keuangan Desa yang belum optimal

2.5. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Daerah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis Daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di atas, permasalahan yang ada, isu-isu strategis, serta capaian kinerja urusan Pemerintahan periode sebelumnya, maka dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah untuk tahun 2025-2029 yang perlu diacu dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 - 2029 adalah **"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan"**, dengan indikator kinerja Tingkat Kemiskinan dan PDRB per kapita dan Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Untuk mewujudkan Visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 **"Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045"** tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu :
   a. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
   b. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
   c. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
   d. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
   e. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
   f. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.
3. Sasaran daerah guna mendukung pencapaian dengan tujuan daerah meliputi:

   Sasaran 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja :
   a. Indeks Integritas Nasional;
   b. Indeks Demokrasi Indonesia;
   c. Otonomi Fiskal Daerah;

   Sasaran 2 : Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis Lingkungan, dengan indikator kinerja :
   a. Pertumbuhan Ekonomi;
   b. Inflasi;
   c. Indeks Kualitas Lingkugan Hidup.

   Sasaran 3 : Terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter, dengan indikator kinerja :
   a. Indeks Modal Manusia;
   b. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Berdasarkan penelaahan terhadap tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, maka pelayanan Dispermades berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung ketercapaian indikator kinerja Daerah diarahkan untuk mendukung Tujuan:

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan pada :

1. Sasaran ke-1, yaitu "**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**" dengan tujuan perangkat daerah: **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** serta **Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.**
2. Sasaran ke-2, yaitu "**Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan**" dengan tujuan perangkat daerah: Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah.

2.6. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Gambar 2.1.
Visi dan Misi RPJMN 2025-2029

2.6.1. Visi RPJMN 2025-2029

Visi RPJMN tahun 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

2.6.2. Misi RPJMN 2025-2029

Dari visi RPJMN tersebut dijabarkan dalam 8 (delapan) Asta Cita/Misi, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SOM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.6.3. Program Prioritas

Dari visi dan misi RPJMN tersebut terjabarkan dalam 17 (Tujuh Belas) program prioritas, dengan rincian :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota

Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

2.6.4. Program Hasil Terbaik Cepat

Dari program prioritas tersebut terjabarkan dalam 8 (Delapan) program hasil terbaik cepat, dengan rincian :

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Meningkatkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/POLRI dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infratruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah.
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

2.6.5. Kerangka Pikir dan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 mengelaborasi substansi dari pendekatan perencanaan teknokratik dan politis. Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045. Delapan Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan.

Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi kewilayahan tidak hanya mencakup strategi pembangunan kawasan timur-barat Indonesia, perdesaan-perkotaan namun mencakup pula rencana intervensi pembangunan di tiap provinsi di

seluruh Indonesia. Highlight intervensi kebijakan wilayah dan provinsi ini disusun untuk menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, langkah penguatan juga dilakukan pada tata kelola pembangunan terutama pada aspek pengendalian pembangunan secara terpadu. Pengendalian memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memformulasikan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Pengendalian pembangunan dipertajam dengan pendekatan manajemen risiko pembangunan nasional.

Gambar 2.2.
Kerangka pikir RPJMN 2025-2029

2.6.6. Strategi RPJMN 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 menekankan secara khusus pada strategi :

Gambar 2.3.
Strategi RPJMN 2025-2029

1. Menurunkan tingkat kemiskinan

Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Secara visual kerangka pikir penurunan tingkat kemiskinan ditampilkan sebagai berikut.

Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah menetapkan empat strategi sebagai berikut :

a. Stabilitas ekonomi makro : pertumbuhan ekonomi inklusif dan menjaga inflasi.
b. Pengurangan beban pengeluaran : bantuan sosial dan jaminan sosial.
c. Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja.
d. Layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah : membangun SDM dan perluasan akses ekonomi.

2. Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dengan memprioritaskan pembangunan manusia, sebuah negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada :

a. Pemenuhan layanan dasar
b. Pembangunan modal manusia
c. Pembangunan modal sosial budaya

Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang.

3. Strategi Mencapai Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan

Pertumbuhan tinggi berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan. Ketiga ujung tombak ini bekerja secara sinergis. Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Secara konkret terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth*, yaitu :

a. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan.
b. Industrialisasi (hilirisasi) : padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan.
c. Pariwisata dan ekonomi kreatif.
d. Ekonomi biru dan ekonomi hijau.
e. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
f. Transformasi digital.
g. Investasi : FDI berorientasi ekspor dan investasi non-APBN.
h. Belanja Negara untuk produktivitas.

4. Transformasi sektor publik sebagai pengungkit

Transformasi sektor publik sebagai pengungkit mewujudkan strategi penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Pembangunan nasional perlu mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola sector publik, yaitu :

a. Birokrasi yang lincah (*agile*).
b. Adaptif, bervisi melampaui zamannya (*thinking ahead*), secara terus menerus (*thinking again*).
c. Dalam horizon berpikir luas lintas batas (*thinking across*).
d. Pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence base*).
e. Didukung dengan data terintegrasi (*integrated big-data*).

2.6.7. Keterkaitan Dengan Tupoksi Dispermades

Apabila dirumuskan, hasil telaah Arah kebijakan dan strategi RPJMN tahun 2025-2029 dari keterkaitan sampai dengan faktor penghambat dan faktor pendorongnya terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.8. sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Telaah Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Sasaran Jangka Menengah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1. Menurunkan tingkat kemiskinan 2. Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Strategi Mencapai Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan 4. Transformasi sektor publik sebagai pengungkit	1. Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam dalam peningkatan pelayanan kependudukan untuk pemenuhan *Basic Life Acces*; 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan Desa; 3. Pengembangan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan berbasis Potensi desa; 4. Pembinaan kelembagaan, perluasan usaha dan peningkatan kapasitas Lembaga Perekonomian Desa; 5. Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga kemasyarakatan; 6. Pembinaan penyelenggaraan database dan informasi Desa/Kelurahan.	1. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang kurang memadai 2. Belum optimalnya pengelolaan data dan Informasi Kependudukan 3. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa; 4. Belum Semua Kabupaten menyusun regulasi tentang pengembangan kawasan perdesaan untuk pengembangan ekonomi lokal. 5. Aksesibilitas di Desa yang terbatas 6. Kompetensi SDM aparatur desa yang masih lemah 7. Infrastruktur pendukung Pemerintahan Desa yang kurang memadai 8. Masih belum meratanya akses layanan dasar di Desa 9. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	**Faktor Penghambat:** 1. Kewenangan Pemerintah Provinsi terbatas; 2. Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Belum seluruh Kabupaten menetapkankan kawasan perdesaan; 4. Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab./Kota dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. 5. Belum adanya *baseline* data klasifikasi pasar desa di masing-masing kabupaten. **Faktor Pendorong:** 1. Dukungan Kabupaten dan Pemerintah Desa; 2. Dukungan pendampingan anggaran; 3. Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa; 4. Peran Pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa 5. Peran perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (non-government organisation/NGO) dalam peningkatan kapasitas, pendampingan, dan pengawasan pembangunan di Desa

2.7. Perumusan Isu Strategis

Tabel 2.9.
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah dan Keragaman Desa 2. Potensi Desa Wisata dan Kearifan Lokal 3. Pertanian dan Ketahanan Pangan Lokal 4. Bonus Demografi 5. Digitalisasi dan Inovasi Layanan	1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Jumlah SDM yang belum ideal 3. Keterbatasan infrastruktur digital 4. Kolaborasi dan koordinasi yang belum optimal 5. Pemanfaatan data kependudukan yang belum optimal	1. Ketimpangan Akses dalam Peningkatan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia 2. Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif 3. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi	1. Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan 2. Transformasi Digital dan Teknologi 4.0 3. Globalisasi Ekonomi dan Ketimpangan Sosial	1. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah 2. Tantangan Pengelolaan Dana Desa 3. Kemiskinan dan Pengangguran 4. Demografi dan Bonus Demografi	1. Urbanisasi dan Tekanan Wilayah Metropolitan 2. Kesenjangan Perkotaan dan Perdesaan 3. Resiliensi Terhadap Bencana 4. Konektivitas Antarwilayah	Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Desa dan Kota Kebergantungan pada Dana Desa Kurangnya Inovasi dan Diversifikasi Ekonomi Desa Ketahanan Sosial dan Lingkungan Desa yang Rentan Urbanisasi dan Migrasi Penduduk Muda Kualitas Data Kependudukan yang Belum Sinkron dan Terintegrasi Masalah Perpindahan Penduduk dan Mobilitas Tinggi Penduduk Keterbatasan Infrastruktur dan SDM Layanan Adminduk di Daerah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

Penguatan Desa serta layanan kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara komprehensif sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan fasilitasi penguatan Desa guna pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan inklusif dipilih guna memastikan terpenuhinya hak masyarakat termasuk kelompok rentan dan marginal, baik hak dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maupun hak masyarakat desa untuk sejahtera. Sedangkan pendekatan pembangunan berkelanjutan guna memastikan bahwa desa memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan yang mendukung terwujudnya desa yang mandiri.

Berdasarkan tantangan dan kebutuhan pembangunan tersebut, guna mendukung tujuan: **"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan Dan Transformasi Sosial Didukung Tata Kelola Berkelanjutan"** pada sasaran ke-1, yaitu **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah"** dengan tujuan perangkat daerah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Serta sasaran ke-2, yaitu **"Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis Lingkungan"** dengan tujuan perangkat daerah Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah maka Dokumen Rencana Strategis Dispermades akan berfokus pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

3.1.1. Tujuan

Tujuan pembangunan daerah ini merupakan penjabaran dan visi dan misi yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan tantangan pembangunan serta isu strategis daerah.

1. **Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah**

   Dispermades Provinsi Jawa Tengah senantiasa berupaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Peningkatan ini diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan internal, penyederhanaan proses bisnis, optimalisasi kinerja aparatur, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui langkah-langkah

strategis dan terukur, diharapkan Reformasi Birokrasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

2. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

   Pemenuhan hak masyarakat atas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi komitmen dan perhatian penting Dispermades mengingat masih belum optimalnya tertib administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah. Upaya peningkatan kualitas layanan publik akan terus dilakukan dan diimbangi dengan promosi tentang hak dan kewajiban masyarakat akan pentingnya data kependudukan. Wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak akan menjadi tantangan serius dalam mewujudkan tujuan ini, dibutuhkan sinergi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota.

3. **Meningkatkan Desa Mandiri**

   Dispermades akan mendorong terwujudnya kemandirian desa melalui fasilitasi penguatan dimensi layanan dasar, dimensi social, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas, dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa yang menjadi komponen penilaian dalam Indeks Desa, sehingga harus dilakukan percepatan untuk meningkatkan kemandirian desa di Jawa Tengah agar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan pembangunan desa berkelanjutan dalam mendukung capaian SDGs's Desa.

3.1.2. Sasaran

Sasaran strategis pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang menggambarkan target pembangunan yang hendak dicapai guna mendukung tujuan pembangunan yang dirumuskan secara lebih terukur, speksifik dan rasional. Adapun sasaran pembangunan yang hendak dicapai oleh Dispermades, yaitu :

1. **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah**

   Dispermades Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dalam rangka menciptakan tata kelola organisasi yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan. Identifikasi risiko secara dini, penilaian tingkat risiko, dan penyusunan strategi mitigasi dilakukan secara sistematis guna meminimalkan potensi hambatan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dengan pengelolaan risiko yang semakin berkualitas, diharapkan tercipta stabilitas operasional dan peningkatan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat.

2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah**

   Dispermades Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penerapan standar pelayanan yang jelas, terukur, dan transparan. Dengan menjunjung tinggi prinsip cepat, tepat, dan akuntabel, pelayanan yang diberikan diharapkan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Upaya ini sejalan dengan visi untuk mewujudkan pelayanan yang inklusif, responsif, dan berkualitas di seluruh lini tugas dan fungsi dinas.

3. **Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah**

   Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Diharapkan dengan terpenuhinya hak tersebut, masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat sehingga dapat mendukung segala kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat dari kelompok rentan dan marginal, seperti: keluarga miskin, penyandang disabilitas, Perempuan Kepala Keluarga, serta kelompok rentan dan marginal lainnya.

4. **Peningkatan Kemandirian Desa di Jawa Tengah**

   Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen dalam mendorong peningkatan kemandirian Desa sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat kemajuan desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, berbagai program strategis difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Pertumbuhan jumlah Desa mandiri yang signifikan mencerminkan keberhasilan upaya pembangunan desa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, peningkatan indeks ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian desa mandiri serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh Dispermades Provinsi Jawa Tengah pada periode 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	-	84,38	85	85,5	86	86,5	87	87,5	87,5
		Meningkatkan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah	Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah (*persentase kepemilikan KTPel, persentase Kepemilikan KIA, persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-17, persentase Ketersediaan Buku Pokok Pemakaman, persentase Kepemilikan Akta Perkawinan dan persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Jawa Tengah*)	%	-	60,85	86,30	86,53	86,76	87,03	87,31	87,59	87,59
			- Persentase kepemilikan KTPel	%	-	99,04	99,05	99,07	99,10	99,14	99,19	99,25	99,25
			- Persentase Kepemilikan KIA	%	-	69,39	69,40	69,42	69,45	69,49	69,54	69,60	69,60

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-17	%	-	99,11	99,11	99,12	99,13	99,14	99,15	99,16	99,16
			- Persentase Ketersediaan Buku Pokok Pemakaman	%		97,53	98,00	98,25	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00
			- Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%		0,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00
			- Persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Jawa Tengah	%		0,00	77,25	77,30	77,35	77,40	77,45	77,50	77,50
2	Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah		Persentase jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah	Nilai	-	24,42	25,86	27,27	28,68	30,09	31,50	32,97	32,97
		Meningkatnya Status Kemandirian Desa di Jawa Tengah	Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Jawa Tengah	%	-	-	5,93	11,69	17,46	23,23	29	35,03	35,03
3.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	-	74,45	74,45	74,50	74,50	74,65	74,65	74,80	74,80
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	%	-	2,503	2,600	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100	3,100
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Nilai	87	84,5	84,5	84,75	85	85,25	85,5	86	86

3.2. Analisis SWOT

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (PD) akan dicapai. Dalam perumusan strategi Dispermades Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, digunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) sebagai instrumen analisis perencanaan strategis. Analisis SWOT dalam perumusan strategi ini digambarkan dalam bagan berikut :

Tabel 3.2.
Analsis SWOT

Strengths	**Weakness**
1. Komitmen Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong kemandirian desa dalam kerangka peran pembinaan dan pengawasan desa; 2. Tersedianya sumber daya (kebijakan, kelembagaan, kapasitas birokrasi, dan anggaran) untuk memperkuat peran pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota dan/atau desa;	1. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 2. Aksesibilitas layanan dasar, infrastruktur, dan keterbukaan wilayah desa yang masih terbatas; 3. Kontribusi sosial ekonomi dari lembaga ekonomi desa yang masih rendah; 4. Kurang memadainya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 5. Rendahnya pemanfaatan data kependudukan.
Opportunities	**Threats**
1. Ketersediaan sumber daya (aset alam, sosial, fisik, finansial, dan manusia) di desa sebagai modal untuk mengoptimalkan pengembangan ekonomi, pemenuhan layanan dasar, dan membangun kerjasama desa; 2. Pengembangan digitalisasi untuk fasilitasi kabupaten/kota dan desa serta layanan adminduk yang dapat memperkuat peran pembinaan dan pengawasan desa serta pelayanan adminduk.	1. Belum optimalnya akses layanan dasar di Desa; 2. Adanya revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahan regulasi turunan UU Desa yang sangat dinamis dan cepat; 3. Dinamika dan polarisasi politik yang mempengaruhi situasi di tingkatan daerah dan desa; 4. Disrupsi digital dan ancaman serangan siber yang mempengaruhi proses pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan secara global dan nasional.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan analisis SWOT di atas, strategi dan arah kebijakan Dispermades Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diuraikan dalam rumusan strategi sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah	Meningkatnya Status Kemandirian Desa di Jawa Tengah	Peningkatan peran Provinsi dalam fasilitasi Penataan Desa, Evaluasi dan penguatan tata kelola Pemerintahan desa	Fasilitasi Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa sesuai dengan kewenangan Provinsi
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
			Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
			Fasilitasi pencatatan data dan Informasi mengenani pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
		Peningkatan peran pembinaan dan pengawasan Kabupaten/Kota dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
			Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
			Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa
		Penguatan interkonektivitas antar desa untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan publik melalui kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan	Fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga sesuai kewenangan provinsi
			Fasilitasi Provinsi dalam pembangunan kawasan perdesaan
			Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa, Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		Penguatan peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat untuk	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		meningkatkan kualitas pembangunan desa dan ketahanan masyarakat hukum adat	Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Jawa Tengah	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pelayanan adminduk skala provinsi	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
		Peningkatan akses dan cakupan masyarakat atas dokumen pencatatan sipil	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
		Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pentahapan kebijakan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Fokus kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah pada tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut.

Gambar 3.1.
Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2029

Kebijakan umum untuk peningkatan kemandirian desa dalam RPJMD Jawa Tengah 2025-2029 terkait kemandirian desa yang dapat diakomodir oleh Dispermades sebagai Berikut :

a. Pemenuhan kebutuhan layanan dasar desa sesuai kewenangan;
b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan untuk mendukung kemandirian desa;
c. Penguatan perwujudan standar pelayanan minimal desa berbasis swadaya masyarakat yang terintegrasi dengan program pos pelayanan terpadu;
d. Peningkatan produktivitas perekonomian berbasis potensi lokal unggulan desa dengan upaya diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi dan ekonomi kreatif;
e. Penguatan peran BUMDes, BUMDesma, dan lembaga ekonomi desa lainnya yang mendukung kemandirian desa;
f. Peningkatan kerja sama desa dengan pihak ketiga dan kerja sama antardesa;
g. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Untuk menyelaraskan fokus pembangunan daerah dan tujuan perangkat daerah tersebut, maka disusunlah pentahapan renstra Dispermades, sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Pentahapan Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa dalam mendukung tata kelola Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa dalam mendukung tata kelola Desa	Fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat Desa untuk mendukung pengembangan potensi desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa dalam mendukung tata kelola Desa	Fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat Desa untuk terus berdaya dan berkontribusi pada pembangunan Desa
Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi dan kebijakan.	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi dan kebijakan.	Fasilitasi pengembangan BUMDes/BUMDesa Bersama memaksimalkan potensi Desa yang dimiliki dan mendorong diversifikasi usaha ekonomi desa ke sektor-sektor yang ramah lingkungan	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi dan kebijakan serta mendorong inovasi dalam pelayanan publik	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi dan kebijakan serta mendorong inovasi dalam pelayanan publik
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan advokasi alokasi anggaran desa yang tepat untuk ketahanan pangan.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan advokasi alokasi anggaran desa yang tepat	Fasilitasi Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mendukung praktik industri hijau dan efisiensi sumber daya di Desa.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa, penataan aset desa dan fasilitasi tukar menukar tanah kas desa.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa, penataan aset desa dan fasilitasi tukar menukar tanah kas desa.
Fasilitasi dan pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa, penataan aset desa dan fasilitasi tukar menukar tanah kas desa.	Fasilitasi pengembangan BUMDes/BUMDesa Bersama di sektor pariwisata dan perekonomian	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa dalam mendukung tata kelola Desa	Fasilitasi Batas Desa dan Kelurahan untuk kepastian hukum dan efisiensi pembangunan	Fasilitasi Batas Desa dan Kelurahan untuk kepastian hukum dan efisiensi pembangunan
Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan Desa	Fasilitasi identifikasi dan pengembangan kawasan perdesaan yang memiliki potensi pariwisata	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi dan kebijakan.	Fasilitasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing produk desa	Fasilitasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing produk desa
Fasilitasi dan pengembangan Kawasan Perdesaan dengan memaksimalkan potensi desa dan penguatan	Fasilitasi dan pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa, penataan aset desa dan	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pembinaan tertib administrasi pemerintahan	Fasilitasi pengembangan BUMDes/BUMDesa Bersama dan penguatan kemitraan untuk peningkatan daya saing	Fasilitasi pengembangan BUMDes/BUMDesa Bersama dan penguatan kemitraan untuk peningkatan daya saing

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
ketahanan pangan di Desa	fasilitasi tukar menukar tanah kas desa.	desa, penataan aset desa dan fasilitasi tukar menukar tanah kas desa.		
Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa utamanya yang mendukung ketahanan pangan di Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan Desa	Fasilitasi identifikasi dan pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan daya saing Desa	Fasilitasi identifikasi dan pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan daya saing Desa
Fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dengan fokus penguatan kapasitas	Fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dengan fokus penguatan kapasitas	Fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dengan fokus penguatan kapasitas	Fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dengan fokus penguatan kapasitas	Fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dengan fokus penguatan kapasitas
Peningkatan fasilitasi untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan fasilitasi untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan fasilitasi untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan fasilitasi untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan fasilitasi untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Peningkatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemanfaatan data kependudukan pada institusi/lembaga/swasta	Peningkatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemanfaatan data kependudukan pada institusi/lembaga/swasta	Peningkatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemanfaatan data kependudukan pada institusi/lembaga/swasta	Peningkatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemanfaatan data kependudukan pada institusi/lembaga/swasta	Peningkatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemanfaatan data kependudukan pada institusi/lembaga/swasta

3.4. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 3.5.
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Dispermades Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 – 2029

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1 (T-1): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah							
Sasaran T-1: Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah	Prosentase kepemilikan KTPel, Kepemilikan KIA dan Kepemilikan Akta Kelahiran, Buku Pokok Pemakaman	Tingkat kepemilikan Dokumen Kependudukan Rendah	3	• Rendahnya pemahaman pentingnya pemanfaatan data kependudukan • Rendahnya tingkat partisipasi dalam pencatatan peristiwa kependudukan • Validitas dan akurasi data serta informasi yang belum optimal	Kepemilikan dokumen kependudukan belum sesuai target	• Pembuatan media publikasi yang inovatif dan Penyebarluasan informasi melalui Media mainstream maupun media sosial • Koordinasi antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	• Dispermades • Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota	5 tahun

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 2 (T-2): Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa di Jawa Tengah	Persentase jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah							
Sasaran T-2: Peningkatan kemandirian Desa di Jawa Tengah	Rata-rata nilai Indeks Desa di Jawa Tengah	Penurunan jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah	2	• Rendahnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa • Sarana dan prasarana yang kurang memadai di Desa • Rendahnya tertib administrasi Desa, Teknologi informasi, sinergitas kelembagaan serta Pengelolaan keuangan Desa yang belum optimal • Kualitas Lembaga ekonomi desa yang masih rendah	Target Kemandirian Desa di Jawa Tengah tidak tercapai	• Peningkatan kapasitas Pemdes • Peningkatan insfrastruktur desa • penguatan tata kelola pemerintahan desa • Penguatan perekonomian Desa	• Dispermades • Pendamping Desa	5 tahun
Tujuan 3 (T-3): Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Dispermades							

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran T-3: Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Nilai Manajemen Resiko (MR) Dispermades	Target Nilai Manajemen Risiko tidak tercapai	3	• Belum semua pegawai memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya manajemen risiko • Kurangnya Keterlibatan dan Kesadaran Risiko	Nilai indikator MR yang rendah	• peningkatan kapasitas pegawai terkait manajemen risiko • Pemantauan dan Evaluasi Risiko yang Berkelanjutan	• Dispermades	5 tahun
Sasaran T-4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dispermades	menurunnya kualitas pelayanan dari Dispermades Prov. Jateng	3	• Lambat dalam merespon keluhan masyarakat.	Menurunnya kepercayaan publik terhadap Dispermades	• Menindaklanjuti aduan sesuai dengan sop yang sudah ditetapkan	• Dispermades	5 tahun

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, data capaian pada tahun awal perencanaan, target kinerja program dan kerangka pendanaan, serta kondisi kinerja pada akhir periode renstra Dispermades Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2025-2030, Dispermades menetapkan 9 (sembilan) Program dan 16 (enam belas) kegiatan yang merupakan instrumen kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana program dan kegiatan tahun 2025-2030 diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Pendaftaran Penduduk

Dengan kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

C. Program Pencatatan Sipil

Dengan kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dengan kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Dengan kegiatan : Penyediaan Profil Kependudukan

F. Program Penataan Desa

Dengan kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat

G. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Dengan kegiatan : Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi

H. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan kegiatan : Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

I. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Dengan kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	74,45	74.50		74.50		74.65		74.65		74.80		Sekretariat	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	2,503	2.700		2.800		2.900		3.000		3.100			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	84.50	84.75		85		85.25		85.50		86			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	19.013.933.000	100	19.642.709.000	100	26.985.154.000	100	26.805.162.000	100	28.635.678.000	Sekretariat	
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	%	71.43	100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	480.000.000	100	535.000.000	100	1.050.000.000	100	1.250.000.000	100	1.400.000.000	Sekretariat - Program	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	5	5	320,000,000	5	350,000,000	5	600,000,000	5	700,000,000	5	750,000,000	Sekretariat - Program	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	4	150,000,000	4	175,000,000	4	400,000,000	4	500,000,000	4	550,000,000		
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	-	34	5.000.000	34	5.000.000	34	25.000.000	34	25.000.000	34	50.000.000		
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000		
			Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dok	12	12	14,705,000,000	12	14,810,000,000	12	15,950,000,000	12	17,025,000,000	12	18,100,000,000	Sekretariat - Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	78	80	14,335,000,000	80	14,400,000,000	82	15,500,000,000	84	16,500,000,000	84	17,500,000,000	Sekretariat - Keuangan	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dok	1	1	370,000,000	1	385,000,000	1	400,000,000	1	450,000,000	1	500,000,000		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan perangkat daerah	Dok	-	-	-	1	25,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000		
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dok	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	Sekretariat - Umum dan Kepegawaian	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	12	1	100,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	Sekretariat - Umum dan Kepegawaian	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	-	-	-	-	-	100	400,000,000	100	250,000,000	100	450,000,000	Sekretariat - Umum dan Kepegawaian	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	-	-	-	-	-	100	150,000,000	-	-	100	150,000,000	Sekretariat - Umum dan	

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	-	-	-	-	-	100	250,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	Kepegawaian	
			Kegiatan Administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	743,933,000	100	917,709,000	100	1,685,154,000	100	1,875,162,000	100	2,225,678,000	Sekretariat - Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	20,000,000	12	20,000,000	12	40,000,000	12	50,000,000	12	75,000,000	Sekretariat - Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10	7	25,000,000	7	25,000,000	10	75,000,000	10	125,162,000	10	150,000,000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	53,000,000	12	60,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	125,000,000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	90,000,000	12	100,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	250,000,000		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	15,000,000	12	17,709,000	12	50,154,000	12	75,000,000	12	100,678,,000		

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	dok	12	-	-	1	5,000,000	1	20,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	1	120,000,000	1	150,000,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	350,000,000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1	320,000,000	1	375,000,000	1	600,000,000	1	620,000,000	1	650,000,000		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dok		-	-	1	45,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	175,000,000		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dok	4	1	100,933,000	1	120,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	5	160,000,000	8	170,000,000	19	3,025,000,000	10	820,000,000	8	500,000,000	Sekretariat - Umum dan Kepegawaian	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Unit	-	-	-	-	-	1	800,000,000	-	-	-	-	Sekretariat - Umum dan	

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kendaraan Dinas Jabatan	dinas jabatan yang disediakan													Kepegawaian	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	3	925,000,000	1	320,000,000	-	-		
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	-	-	-	1	50,000,000	5	250,000,000	-	-	3	150,000,000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	1	550,000,000	-	-	-	-		
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	2	4	120,000,000	4	120,000,000	7	400,000,000	7	400,000,000	5	350,000,000		
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	-	1	40,000,000	-	-	2	100,000,000	2	100,000,000	-	-		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1	2,185,000,000	1	2,350,000,000	1	2,900,000,000	1	3,310,000,000	1	3,585,000,000	Sekretariat - Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	-	-	-	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Sekretariat - Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1	500,000,000	1	520,000,000	1	600,000,000	1	610,000,000	1	650,000,000		

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1	25,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1	1,660,000,000	1	1,800,000,000	1	2,200,000,000	1	2,600,000,000	1	2,810,000,000		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	12	640,000,000	12	760,000,000	12	1,775,000,000	12	2,075,000,000	12	2,125,000,000	Sekretariat - Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	-	-	-	-	-	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	Sekretariat - Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	205,000,000	20	230,000,000	18	400,000,000	18	500,000,000	18	500,000,000		
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	-	5	5,000,000	7	10,000,000	5	75,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000		

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	40,000,000	12	60,000,000	12	125,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000		
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	60,000,000	12	70,000,000	12	175,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000		
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	12	60,000,000	12	60,000,000	12	100,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	12	250,000,000	12	300,000,000	12	650,000,000	12	700,000,000	12	750,000,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	12	12	20,000,000	12	30,000,000	12	100,000,000	12	125,000,000	12	125,000,000		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	84.38	85,50		86		86,50		87		87,50			
	Meningkatkan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah			Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah	%	91.27	86,53		86,76		87,03		87,31		87,59			

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	99.04	99,07	210,000,000	99,10	240,000,000	99,14	375,000,000	99,19	425,000,000	99,25	450,000,000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el	%	99.00	99,43	210,000,000	99,44	240,000,000	99,45	375,000,000	99,46	425,000,000	99,47	450,000,000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi	Dok	1	1	210,000,000	1	240,000,000	1	375,000,000	1	425,000,000	1	450,000,000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%	99.11	99,12	200,000,000	99,13	220,000,000	99,14	350,000,000	99,15	400,000,000	99,16	425,000,000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk usia 0-4 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%	99.00	98	200,000,000	98,25	220,000,000	98,50	350,000,000	98,75	400,000,000	99	425,000,000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi	dok	1	1	200,000,000	1	220,000,000	1	350,000,000	1	400,000,000	1	425,000,000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Institusi/Lembaga/Badan Hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	200,000,000	100	210,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000	100	425,000,000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan yang terpublish	%	-	100	200,000,000	100	210,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000	100	425,000,000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil pembinaan dan pengawasan tekait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	dok	1	1	200,000,000	1	210,000,000	1	350,000,000	1	400,000,000	1	425,000,000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Profil Data Kependudukan Jawa Tengah yang tersusun	%	-	-	-	100	30,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Pengumpulan data dukung penyusunan profil data kependudukan Jawa Tengah	data	-	-	-	4	30,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Hasil penyediaan data kependudukan sebagai bahan dasar profil data kependudukan	Dok	-	-	-	1	30,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah				Persentase jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah	%	24.42	27,27		28,68		30,09		31,50		32,97			
	Meningkatnya Status Kemandirian Desa di Jawa Tengah			Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Jawa Tengah	%	-	11,69		17,46		23,23		29,00		35,03			
			PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	%	-	100	20,000,000	100	40,000,000	100	50,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	Bidang Penataan dan Regulasi Desa	
			Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan Penataan Desa	Kab	-	29	20,000,000	29	40,000,000	29	50,000,000	29	75,000,000	29	75,000,000	Bidang Penataan dan Regulasi Desa	
			Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dok	-	1	20,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	Bidang Penataan dan Regulasi Desa	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam IPKP	%	27.40	57.05	550,000,000	67.11	630,000,000	80.54	875,000,000	90.60	1,050,000,000	100	1,150,000,000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan kerjasama Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi	kerjasama	2	1	550,000,000	2	650,000,000	3	875,000,000	3	1,050,000,000	2	1,150,000,000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
				Jumlah pengembangan kawasan prioritas Provinsi Jawa Tengah yang terfasilitasi	kawasan	1	1		1		1		1		1			
			Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Hasil fasilitasi kerjasama Desa yang Dilaksanakan	Dok	1	1	150,000,000	1	180,000,000	1	275,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	Dok	1	1	400,000,000	1	450,000,000	1	600,000,000	1	750,000,000	1	800,000,000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa	%	100	100	2,270,000,000	100	2,830,000,000	100	4,790,000,000	100	5,850,000,000	100	7,050,000,000	Bidang Penataan dan Regulasi Desa	
				Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100			Bidang Bina Pemerintahan Desa	

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase BUMDesma dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%		82.02		82.58		83.71		84.27		85.39		Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Daerah yang terfasilitasi penyusunan regulasi Daerah yang berkaitan dengan Desa	Dokumen	348	55	6,750,000,000	60	6,600,000,000	70	6,650,000,000	75	6,725,000,000	75	6,725,000,000	Bidang Penataan dan Regulasi Desa	
				Jumlah penyusunan produk hukum Desa yang terfasilitasi	Desa	-	-		10		29		29		29			
				Jumlah Daerah yang terbina dalam pelaksanaan Pilkades	Kabupaten	-	29		29		29		29		29			
				Jumlah Daerah yang terbina dan termonitoring dalam evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan	daerah	35	35		35		35		35		35			
				Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa	Kabupaten	1	29		29		29		29		29			
				Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam pembaharuan data Profil Desa dan Kelurahan	Kab/Kota	35	35		35		35		35		35			

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Desa yang terfasilitasi untuk penggunaan teknologi informasi dan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa	Desa	32	58		58		90		120		150			
				Jumlah aparatur Kabupaten dan Kecamatan yang dilatih dalam penguatan manajemen Pemerintahan Desa	orang	29	-		-		150		200		300		Bidang Bina Pemerintahan Desa	
				Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam Peningkatan kapasitas manajemen Pemerintahan Desa	orang	-	200		240		320		500		560			
				Jumlah aparatur yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan Desa	orang	29	58		58		116		116		145			
				Jumlah aparatur yang difasilitasi dalam pengelolaan aset Desa	orang	-	58		58		58		58		58			

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam tukar menukar tanah kas Desa (PSN, Kepentingan umum dan bukan kepentingan umum) dengan izin persetujuan dan/atau BA verifikasi data	dok	55	50		50		50		50		50			
				Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditalih dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	orang	-	58		116		145		145		203			
				Jumlah Daerah yang di fasilitasi dalam bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana Desa	daerah	29	29		29		29		29		29			
				Jumlah pengelola BUMDesma yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	-	80		100		200		200		250		Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa	dok	1	1	310.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	475.000.000	Bidang Penataan dan Regulasi Desa	

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Hasil fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	dok	-	-	-	1	25.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000		
			Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Hasil Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	orang	-	1	25.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dok	1	1	330.000.000	1	385.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	650.000.000		
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	dok	1	1	25.000.000	1	40.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000		
			Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Kabupaten/Kota Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	dok	-	1	25.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000		
			Fasilitasi pencatatan data dan Informasi mengenani pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Hasil fasilitasi pencatatan data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten	dok	-	1	275.000.000	1	325.000.000	1	465.000.000	1	575.000.000	1	675.000.000		
			Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	dok	1	-	-	-	-	1	300.000.000	1	450.000.000	1	600.000.000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	
			Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	dok	1	200	525.000.000	240	635.000.000	320	800.000.000	500	1.200.000.000	560	1.400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	dok	-	1	50.000.000	1	85.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Hasil fasilitasi pengelolaan Aset Desa	dok		1	200.000.000	1	250.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000		
			Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa	Hasil peningkatan kapasitas anggota BPD dalam manajemen Pemerintahan Desa	dok	1	1	75.000.000	1	125.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	500.000.000		
			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Hasil pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan Desa	dok	1	1	355.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000		
			Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	dok	-	1	75.000.000	1	110.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	36.19	45.96	3,090,000,000	46.46	3,500,000,000	46.96	5,275,000,000	47.46	6,000,000,000	47.96	6,900,000,000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatannya	%	100	100		100		100		100		100		Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat	
				Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa	%	100	100		100		100		100		100		
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Jumlah pengelola BUMDes dengan klasifikasi pemula dan berkembang yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	360	350	3,090,000,000	400	3,500,000,000	600	5,275,000,000	650	6,000,000,000	750	6,900,000,000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
				Jumlah Lembaga Adat Desa yang difasilitasi pembentukannya dalam pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat	Lembaga	-	58		58		87		116		145		Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat	
				Jumlah LPMD/K yang difasilitasi Penguatan Kapasitas	orang	150	175		200		275		325		400			

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Kelembagaannya														
				Jumlah Tim Pembina Posyandu Kabupaten/ Kota yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	70	70		70		70		70		70			
				Jumlah Daerah yang di fasilitasi Kelembagaan Posyantek Kabupaten/ Kota dalam pemanfaatan TTG	Kabupaten/ Kota	-	35		35		35		35		35			
				Jumlah Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	35	35		35		35		35		35			
				Jumlah TP. PKK Kabupaten/ Kota yang difasilitasi dalam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/ Kota	35	35		35		35		35		35			
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa	Dokumen	1	1	550.000.000	1	650.000.000	1	1.200.000.000	1	1.500.000.000	1	1.650.000.000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	Dokumen	-	1	90.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat	
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Dokumen	1	1	200.000.000	1	225.000.000	1	425.000.000	1	450.000.000	1	600.000.000		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Hasil peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Lembaga	1	35	175.000.000	35	250.000.000	35	425.000.000	35	500.000.000	35	550.000.000		
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan	Dokumen	1	1	550.000.000	1	650.000.000	1	1.200.000.000	1	1.500.000.000	1	1.650.000.000		

Tujuan	Sasaran	Outcome/ Output	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pendapatan Asli Desa	pendapatan asli Desa														
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Laporan	1	1	225.000.000	1	280.000.000	1	375.000.000	1	400.000.000	1	550.000.000		
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Dokumen	1	1	100.000.000	1	170.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	475.000.000		
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Dokumen	1	1	1.750.000.000	1	1.825.000.000	1	2.400.000.000	1	2.600.000.000	1	2.825.000.000		
JUMLAH								25,553,933,000		27,342,709,000		39,100,154,000		41,055,162,000		45,160,678,000		

Tabel 4.2.
Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Output*/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1	**Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.**	**Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif dengan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, serta fokus pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta perangkat desa**	200 Orang 58 Orang	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang Bina Pemerintahan Desa	
				Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa		BPSDMD
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		
2	**Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)**	**Peningkatan akses dan kualitas hidup bagi kelompok sasaran serta optimalisasi peran kecamatan**	5 Dok	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat - Program	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			35 Kab/Kota	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat	
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		DP3AKB, TP-PKK
			99,42%	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi		
			100%	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
3	**Desa maju dan berdaya melalui pembangunan**	**Pengembangan desa yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat,**	1 Kerjasama 1 Kawasan	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Output*/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
	lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.	**peningkatan kualitas hidup, dan kemandirian desa.**		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
				Sub Kegiatan Fasilitasi pengembangan kawasan prioritas Provinsi Jawa Tengah		Dinpertan, Disporapar
			80 Dok 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota 58 Desa 50 Dok 29 Kab 80 Orang	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang Penataan dan Regulasi Desa	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa		Biro Hukum
				Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Bappeda, Biro Pemotdaker, Biro Hukum, Dinkes
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Desa untuk penggunaan teknologi informasi dan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Bidang Bina Pemerintahan Desa	Biro Hukum, Disperakim
				Sub Kegiatan Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis		Disperakim, Dinas PSDATARU, Dispora, dsb
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
			350 Orang	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
4	**BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)**	**Meningkatkan peran BUMDes dan BUMDes Bersama dalam usaha peningkatan perekonomian desa di Jawa Tengah**	80 Orang	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa		

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Output*/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
			350 Orang	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
5	**Peningkatan Bantuan Keuangan Desa**	**Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Desa melalui Bantuan Keuangan Provinsi**	29 Kab	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang Bina Pemerintahan Desa	
				Sub Kegiatan Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis		Disperakim, Dinas PUSDATARU, Dinas ESDM
6	**Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja (Dukungan verifikasi data penduduk rentang usia Gen Z dan Milenial)**	**Pemanfaatan Data Kependudukan**	100%	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
7	**Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalinnya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media, dan lembaga keuangan) - Pembuatan Forum Kepala Desa**	**Pembentukan forum komunikasi Organisasi Kepala Desa dan Organisasi Perangkat Desa**	200 Orang	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat	
				Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa		
8	**Pembinaan kebudayaan lokal bekerjasama dengan Akademisi/Perguruan Tinggi (Pembinaan Lembaga Adat)**	**Terbentuknya Lembaga Adat Desa dalam pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Jawa Tengah**	58 Lembaga	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat	
				Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		

Tabel 4.3.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Dispermades	-	74,45	74,45	74,50	74,50	74,65	74,65	74,80	
2	Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah	-	84,38	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	
3	Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah (persentase kepemilikan KTPel, persentase Kepemilikan KIA, persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-17, persentase Ketersediaan Buku Pokok Pemakaman, persentase Kepemilikan Akta Perkawinan dan persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Jawa Tengah)	-	60,85	86,30	86,53	86,76	87,03	87,31	87,59	
	Persentase kepemilikan KTPel	-	99,04	99,05	99,07	99,10	99,14	99,19	99,25	
	Persentase Kepemilikan KIA	-	69,39	69,40	69,42	69,45	69,49	69,54	69,60	
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-17	-	99,11	99,11	99,12	99,13	99,14	99,15	99,16	
	Persentase Ketersediaan Buku Pokok Pemakaman	-	97,53	98,00	98,25	98,50	99,00	99,50	100,00	
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	-	0,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Jawa Tengah	-	0,00	77,25	77,30	77,35	77,40	77,45	77,50	
4	Persentase jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah	-	24,42	25,86	27,27	28,68	30,09	31,50	32,97	

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah	-	84,38	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	
2	Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah (persentase kepemilikan KTPel, persentase Kepemilikan KIA, persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-17, persentase Ketersediaan Buku Pokok Pemakaman, persentase Kepemilikan Akta Perkawinan dan persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Jawa Tengah)	-	60,85	86,30	86,53	86,76	87,03	87,31	87,59	
	Persentase kepemilikan KTPel	-	99,04	99,05	99,07	99,10	99,14	99,19	99,25	
	Persentase Kepemilikan KIA	-	69,39	69,40	69,42	69,45	69,49	69,54	69,60	
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-17	-	99,11	99,11	99,12	99,13	99,14	99,15	99,16	
	Persentase Ketersediaan Buku Pokok Pemakaman	-	97,53	98,00	98,25	98,50	99,00	99,50	100,00	
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	-	0,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Jawa Tengah	-	0,00	77,25	77,30	77,35	77,40	77,45	77,50	
3	Presentase penduduk usia 0-4 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	-	-	97,75	98	98,25	98,50	98,75	99	
4	Persentase jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah	-	24,42	25,86	27,27	28,68	30,09	31,50	32,97	
5	Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam Peningkatan kapasitas manajemen Pemerintahan Desa	-	-	-	200	240	320	500	560	
6	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam IPKP	-	27,40	46,98	57,05	67,11	80,54	90,60	100	
7	Persentase BUMDesma dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	-	-	80,90	82,02	82,58	83,71	84,27	85,39	
8	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	-	36,19	45,46	45,96	46,46	46,96	47,46	47,96	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini telah disusun sebagai kompas dan pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan kristalisasi dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur, serta mencerminkan komitmen kuat untuk berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian desa, serta tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra ini telah melalui serangkaian proses partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan relevansi dan akuntabilitasnya dalam menjawab tantangan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang terus berkembang.

Keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini sangat bergantung pada komitmen, kerja keras, kolaborasi sinergis, dan integritas dari seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut, dukungan dan partisipasi aktif dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, akademisi, media, serta seluruh elemen masyarakat menjadi kunci penentu tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa dinamika perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, akan selalu menjadi tantangan. Oleh karena itu, fleksibilitas, inovasi, adaptasi, serta evaluasi berkelanjutan akan menjadi bagian integral dari pelaksanaan Renstra ini.

Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, kami berharap Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien, dan akuntabel. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan dapat memberikan dampak nyata bagi terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang semakin berdaya, desa yang maju dan mandiri, serta pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang prima, sebagai bagian integral dari visi besar Provinsi Jawa Tengah. Akhir kata, semoga Renstra ini menjadi landasan yang kokoh untuk bekerja dan berkarya demi kemajuan bersama.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19720924 199703 1 003

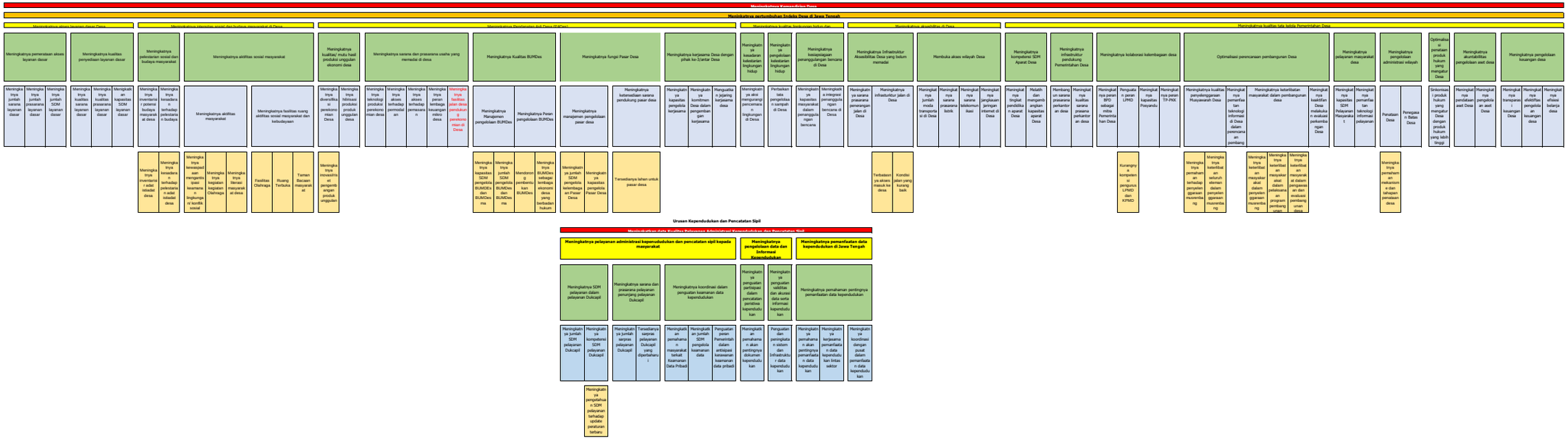
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
Meningkatnya Kemandirian Desa
Meningkatnya pertumbuhan Indeks Desa di Jawa Tengah
Meningkatnya akses layanan dasar Desa
Meningkatnya ekonomi dan budaya masyarakat di Desa
Meningkatnya Pembangunan dan Desa (KPDes)
Meningkatnya kualitas kelembagaan desa
Meningkatnya aksesibilitas di Desa
Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Desa
Meningkatnya pemerataan akses layanan dasar
Meningkatnya kualitas penyediaan layanan dasar
Meningkatnya pelestarian sosial dan budaya masyarakat
Meningkatnya aktifitas sosial masyarakat
Meningkatnya kualitas/ mutu hasil produksi unggulan ekonomi desa
Meningkatnya sarana dan prasarana usaha yang memadai di desa
Meningkatnya Kualitas BUMDes
Meningkatnya fungsi Pasar Desa
Meningkatnya kerjasama Desa dengan pihak ke-3/antar Desa
Meningkatnya kesadaran kelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya pengelolaan kelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Desa
Meningkatnya sarana prasarana pemerangan jalan di Desa
Meningkatnya Infrastruktur Aksesibilitas Desa yang belum memadai
Membuka akses wilayah Desa
Meningkatnya kompetensi SDM Aparat Desa
Meningkatnya infrastruktur pendukung Pemerintahan Desa
Meningkatnya kolaborasi kelembagaan desa
Optimalisasi pemanfaatan produk hukum yang mengatur Desa
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset desa
Meningkatnya pengelolaan keuangan desa
Meningkatnya inventarisasi potensi budaya masyarakat desa
Meningkatnya kesadaran terhadap pelestarian budaya
Meningkatnya aktifitas masyarakat
Meningkatnya fasilitas ruang aktifitas sosial masyarakat dan kebudayaan
Meningkatnya diversifikasi pereklomian Desa
Meningkatnya hilirisasi produksi produksi unggulan desa
Meningkatnya teknologi produksi pereklomian desa
Meningkatnya akses terhadap permodalan
Meningkatnya akses terhadap pemasaran
Meningkatnya peran lembaga keuangan mikro desa
Meningkatnya fasilitas jalan desa penduduk g pereklomian di Desa
Meningkatnya Manajemen pengelolaan BUMDes
Meningkatnya Peran pengelolaan BUMDes
Meningkatnya manajemen pengelolaan pasar desa
Meningkatnya ketersediaan sarana pendukung pasar desa
Meningkatnya kapasitas pengelola kerjasama
Meningkatnya komitmen Desa dalam pengembangan kerjasama
Menguatkan jejaring kerjasama desa
Meningkatnya aksi mengurangi pencemaran lingkungan di Desa
Pertakukan tata pengelolaan n sampah di Desa
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana
Meningkatnya integrasi pemanggila-ngan bencana di Desa
Meningkatnya sarana prasarana pemerangan jalan di Desa
Meningkatnya Infrastruktur jalan di Desa
Meningkatnya jumlah moda transporta si di Desa
Meningkatnya sarana prasarana listrik
Meningkatnya sarana telekomunikasi
Meningkatnya pengluasan jaringan internet di Desa
Meningkatnya tingkat pendidikan aparat Desa
Melatih dan mengenti-angkan kapasitas aparat Desa
Membangun sarana prasarana perkantoran desa
Meningkatnya kualitas sarana prasana perkantoran desa
Meningkatnya peran BPD sebagai mitra Pemerintah Desa
Penguatan peran LPMD
Meningkatnya kapasitas Posyandu
Meningkatnya peran TP-PKK
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi di Desa dalam pemrograman pembang
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa
Meningkatnya kualitasan Desa melalukan n evaluasi perkembangan Desa
Meningkatnya kapasitas SDM Pelayanan Masyaraka t
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi pelayanan
Penatatan Desa
Penegasa n Batas Desa
Sinkronisasi produk hukum yang mengatur Desa dengan produk hukum yang lebih tinggi
Meningkatnya pemdalaan aset Desa
Meningkatnya pengelola an aset Desa
Meningkatnya transparansi keuangan Desa
Meningkatnya efektifitas pengelola an keuangan desa
Meningkatnya efiesi belanja desa
Meningkatnya inventarisasi adat istiadat desa
Meningkatnya kesadaran terhadap pelestarian adat istiadat desa
Meningkatnya kegiatan kegiatan Olahraga
Meningkatnya literasi masyarakat desa
Fasilitas Olahraga
Ruang Terbuka
Taman Bacaan masyarakat
Meningkatnya inovasi/ins en pengembangan produk unggulan
Meningkatnya SDM pengelola kelembagaan BUMDEs dan BUMDes ma
Meningkatnya jumlah SDM pengelola BUMDes dan BUMDes ma
Mendorong pembentu-kan BUMDes
Meningkatnya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berbadan hukum
Meningkatnya jumlah SDM pengelola kelembaga an Pasar Desa
Meningkatnya kapasitas pengelola Pasar Desa
Tersedianya lahan untuk pasar desa
Terfasilitasn ya akses masuk ke desa
Kondisi jalan yang kurang baik
Kurangny a kompeten si pengurus LPMD dan KPMD
Meningkatnya pemahaman pentingnya pemanfaatan data kependudukan
Meningkatnya keterlibat an masyarakat dalam pengawas an dan evaluasi pembangunan desa
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen dan kepuasan pelayanan desa
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan tata kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat
Meningkatnya pengelolaan data dan Informasi Kependudukan
Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan di Jawa Tengah
Meningkatnya SDM pelayanan dalam pelayanan Dukcapil
Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan, penunjang pelayanan Dukcapil
Meningkatnya koordinasi dalam penguatan kuamanan data kependudukan
Meningkatnya pemahaman pentingnya pemanfaatan data kependudukan
Meningkatnya jumlah SDM pelayanan Dukcapil
Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan Dukcapil
Meningkatnya jumlah sarpras pelayanan Dukcapil
Tersedianya sarpras pelayanan Dukcapil yang diperbaharu i
Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait kuamanan Data Pribadi
Meningkatnya jumlah SDM pengelola kuamanan data
Penguatan pooan Pemerintah dalam antisipasi kerawanan kuamanan data pribadi
Meningkatnya pemahaman akan pentingnya diikutinya kependudu kan
Penguatan dan peningkatan sistem dan Infrastruktur data kependudu kan
Meningkatnya pemahaman akan pentingnya pemanfaatan data kependudu kan
Meningkatnya kerjasama pemanfaatan data kependudu kan lintas sektor
Meningkatnya koordinasi dengan pusat dalam pemanfaatan data kependudu kan
Meningkatnya pengetahuan SDM pelayanan terhadap update peraturan terbaru

CASCADING DISPERMADES

TUJUAN

Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah
Indikator : Persentase Jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah
Formulasi : (Σ Desa Mandiri tahun n) / (Σ Desa di Jawa Tengah) x 100%

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
IK : Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota dari Ditjen Dukcapil Kemendagri

SASARAN

Meningkatnya Status Kemandirian Desa di Jawa Tengah
Indikator: Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Jawa Tengah
Formulasi : (Jumlah desa mandiri tahun n - jumlah desa mandiri tahun Baseline Renstra) / (Jumlah desa mandiri tahun Baseline Renstra) x 100%

Meningkatkan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah
IK : Prosentase kepemilikan KTPel, Kepemilikan KIA dan Kepemilikan Akta Kelahiran, Buku Pokok Pemakaman

PROGRAM

Bidang Penataan dan Regulasi Desa

Uraian Program	Indikator	Formula
Program Penataan Desa	Presentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	(Jumlah Kabupaten yang di fasilitasi) / (Jumlah Kabupaten yang mengajukan penataan desa di Jawa Tengah) x 100%

Uraian Program	Indikator	Formula
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa	(Jumlah Kabupaten di Jawa Tengah yang terfasilitasi pada tahun n) / (Jumlah Kabupaten di Jawa Tengah) x 100%

Bidang Bina Pemerintahan Desa

Uraian Program	Indikator	Formula
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa	(Jumlah Kabupaten di Jawa Tengah yang terfasilitasi pada tahun n) / (Jumlah Kabupaten di Jawa Tengah) x 100%

Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa

Uraian Program	Indikator	Formula
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam IPKP	(Jumlah Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifikasi pada tahun n) / (Target akhir Jumlah Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifikasi) x 100%

Uraian Program	Indikator	Formula
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDesma dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	(Jumlah BUMDesma dengan klasifikasi Berkembang dan Maju di Jawa Tengah pada tahun n) / (Jumlah BUMDesma di Jawa Tengah pada tahun n) x 100%

Uraian Program	Indikator	Formula
Program Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	(Jumlah BUMDes dengan klasifikasi Berkembang dan Maju di Jawa Tengah pada tahun n) / (Jumlah BUMDesa di Jawa Tengah pada tahun n) x 100%

Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat

Uraian Program	Indikator	Formula
Program Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatann ya	(Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi pada tahun n) / (Jumlah Daerah di Jawa Tengah) x 100%
	Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa	(Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa pada tahun n) / (Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) x 100%

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian Program	Indikator	Formula
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	(Jumlah penduduk wajib KTP-el yang terfasilitasi kepemilikan di tahun n) / (Jumlah penduduk yang wajib KTP-el di Jawa Tengah) x 100%

Uraian Program	Indikator	Formula
Program Pencatatan Sipil	Presentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	(Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi Akta Kelahiran di tahun n) / (Jumlah Penduduk usia 0-17 tahun) x 100%

Uraian Program	Indikator	Formula
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Institusi/Lembaga /Badan Hukum yang difasilitasi dalam pemanfaatan data kependudukan	(Jumlah Institusi/ Lembaga/ Badan Hukum yang difasilitasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan tahun n) / (Jumlah ajuan Institusi/ Lembaga/ Badan Hukum yang difasilitasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan) x 100%

Uraian Program	Indikator	Formula
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Presentase profil data kependudukan Jawa Tengah yang tersusun	(Jumlah profil data kependudukan Jawa Tengah yang terbit) / (Target jumlah profil data kependudukan Jawa Tengah yang terbit dalam 1 tahun) x 100%

KEGIATAN

Bidang Penataan dan Regulasi Desa

Uraian Kegiatan	Indikator	Formula
Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagian, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	Fasilitasi Kabupaten dalam rangka sosialisasi dan evaluasi Penataan Desa	Jumlah Kabupaten yang di fasilitasi dalam rangka pembinaan Penataan Desa

Uraian Kegiatan	Indikator	Formula
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi dan rekomendasi regulasi Daerah yang berkaitan dengan Desa	Jumlah dokumen regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa yang difasilitasi dan direkomendasikan
	Fasilitasi penyusunan produk hukum Desa	Jumlah Desa yang termonitor dalam penyusunan produk hukum desa
	Pembinaan dan monitoring Daerah dalam pelaksanaan Pilkades serentak dan evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah Daerah yang terbina dan termonitor dalam pelaksanaan Pilkades serentak serta evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan
	Fasilitasi penetapan dan penegasan Batas Desa	Jumlah Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam pembaharuan data Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam update Profil Desa dan Kelurahan
	Fasilitasi Desa untuk penggunaan teknologi informasi dan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa	Jumlah Desa di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi informasi dan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa

Uraian Kegiatan	Indikator	Formula
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan kapasitas aparatur Kabupaten dan Kecamatan dalam manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur Kabupaten dan Kecamatan yang dilatih dalam penguatan manajemen Pemerintahan Desa
	Penguatan manajemen Pemerintahan Desa bagi aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur yang dilatih dalam penguatan manajemen Pemerintahan Desa
	Peningkatan pengetahuan aparatur Pemerintahan dalam pengelolaan keuangan Desa	Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan keuangan Desa
	Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan dalam pengelolaan aset Desa	Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan aset Desa
	Fasilitasi daerah dan rekomendasi izin persetujuan yang diberikan terkait tukar menukar tanah kas Desa (PSN, Kepentingan umum dan bukan kepentingan umum)	Jumlah ajuan dokumen tukar menukar tanah kas Desa yang difasilitasi dan direkomendasi
	Peningkatan kapasitas anggota BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah anggota BPD yang dilatih dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Kabupaten dalam pengelolaan dan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Peningkatan Sarana Prasarana Desa	Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa

Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa

Uraian Kegiatan	Indikator	Formula
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Fasilitasi pelaksanaan kerjasama Desa di Jawa Tengah	Jumlah kerjasama yang di fasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama Desa
	Fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan prioritas Provinsi Jawa Tengah	Jumlah pengembangan kawasan perdesaan prioritas Provinsi Jawa Tengah yang terfasilitasi

Uraian Kegiatan	Indikator	Formula
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penguatan kapasitas pengelola BUMDesma	Jumlah BUMDesma yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya

Uraian Kegiatan	Indikator	Formula
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kapasitas pengelola BUMDesma dengan klasifikasi pemula dan berkembang	Jumlah BUMDes dengan klasifikasi pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya

Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat

Uraian Kegiatan	Indikator	Formula
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pembentukan Lembaga Adat Desa dalam pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Lembaga Adat Desa yang terbentuk
	Peningkatan kapasitas anggota LPMD/K dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat
	Peningkatan kapasitas Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota	Jumlah tim pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas
	Fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek dalam pemanfaatan TTG	Jumlah Posyantek yang di fasilitasi dalam penguatan kelembagaannya
	Fasilitasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam TMMD
	Fasilitasi TP. PKK Kabupaten/Kota dalam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian Kegiatan	Indikator	Formula
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el	(Jumlah penduduk wajib KTP-el yang terfasilitasi perekaman KTP-el di tahun n) / (Jumlah penduduk yang wajib KTP-el di Jawa Tengah) x 100%

Uraian Kegiatan	Indikator	Formula
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase penduduk usia 0-4 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	(Jumlah penduduk usia 0-4 tahun yang terfasilitasi Akta Kelahiran di tahun n) / (Jumlah Penduduk usia 0-4 tahun) x 100%

Uraian Kegiatan	Indikator	Formula
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Presentase sosialisasi administrasi kependudukan yang terpublish	(Jumlah materi sosialisasi yang di terbitkan) / (Jumlah rencana materi sosialisasi yang akan diterbitkan dalam 1 tahun) x 100%

Uraian Kegiatan	Indikator	Formula
Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Pengumpulan data dukung penyusunan profil data kependudukan Jawa Tengah	Jumlah data pendukung profil data kependudukan dari lintas sektor

SUB KEGIATAN

Bidang Penataan dan Regulasi Desa

Uraian Sub Kegiatan	Indikator	Formula
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa

Uraian Sub Kegiatan	Indikator	Formula
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa

Uraian Sub Kegiatan	Indikator	Formula
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen hasil pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen hasil Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa

Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa

Uraian Sub Kegiatan	Indikator	Formula
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Fasilitasi kerjasama Desa yang Dilaksanakan	jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama Desa yang Dilaksanakan
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan

Uraian Sub Kegiatan	Indikator	Formula
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

Uraian Sub Kegiatan	Indikator	Formula
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa

Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat

Uraian Sub Kegiatan	Indikator	Formula
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian Sub Kegiatan	Indikator	Formula
Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi

Uraian Sub Kegiatan	Indikator	Formula
Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi

Uraian Sub Kegiatan	Indikator	Formula
Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil pembinaan dan pengawasan tekait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan tekait pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Uraian Sub Kegiatan	Indikator	Formula
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Hasil penyediaan data kependudukan sebagai bahan dasar profil data kependudukan	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia

Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
Fasilitasi pencatatan data dan Informasi mengenani pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Fasilitasi pencatatan data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pencatatan data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi pengelolaan Aset Desa	Dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Aset Desa
Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Terlaksanannya pembinaan aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang dibina
Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Tekn	Pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan Desa
Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa	Peningkatan kapasitas anggota BPD dalam manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Hasil peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Dispermades Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 – 2029

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1 (T-1): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah							
Sasaran T-1: Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah	Prosentase kepemilikan KTPel, Kepemilikan KIA dan Kepemilikan Akta Kelahiran, Buku Pokok Pemakaman	Tingkat kepemilikan Dokumen Kependudukan Rendah	3	• Rendahnya pemahaman pentingnya pemanfaatan data kependudukan • Rendahnya tingkat partisipasi dalam pencatatan peristiwa kependudukan • Validitas dan akurasi data serta informasi yang belum optimal	Kepemilikan dokumen kependudukan belum sesuai target	• Pembuatan media publikasi yang inovatif dan Penyebarluasan informasi melalui Media mainstream maupun media sosial • Koordinasi antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	• Dispermades • Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota	5 tahun
Tujuan 2 (T-2): Meningkatnya Tingkat Kemandirian Desa di Jawa Tengah	Persentase jumlah Desa Mandiri di Jawa Tengah							
Sasaran T-2: Peningkatan kemandirian Desa di Jawa Tengah	Rata-rata nilai Indeks Desa di Jawa Tengah	Penurunan jumlah Desa	2	• Rendahnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa	Target Kemandirian Desa di Jawa Tengah tidak tercapai	• Peningkatan kapasitas Pemdes • Peningkatan insfrastruktur desa	• Dispermades • Pendamping Desa	5 tahun

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Mandiri di Jawa Tengah		• Sarana dan prasarana yang kurang memadai di Desa • Rendahnya tertib administrasi Desa, Teknologi informasi, sinergitas kelembagaan serta Pengelolaan keuangan Desa yang belum optimal • Kualitas Lembaga ekonomi desa yang masih rendah		• penguatan tata kelola pemerintahan desa • Penguatan perekonomian Desa		
Tujuan 3 (T-3): Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Dispermades							
Sasaran T-3: Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan	Nilai Manajemen Resiko (MR) Dispermades	Target Nilai Manajemen Risiko tidak tercapai	3	• Belum semua pegawai memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya manajemen risiko • Kurangnya Keterlibatan dan Kesadaran Risiko	Nilai indikator MR yang rendah	• peningkatan kapasitas pegawai terkait manajemen risiko • Pemantauan dan Evaluasi Risiko yang Berkelanjutan	• Dispermades	5 tahun

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sipil Provinsi Jawa Tengah								
Sasaran T-4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dispermades	menurunnya kualitas pelayanan dari Dispermades Prov. Jateng	3	• Lambat dalam merespon keluhan masyarakat.	Menurunnya kepercayaan publik terhadap Dispermades	• Menindaklanjuti aduan sesuai dengan sop yang sudah ditetapkan	• Dispermades	5 tahun

DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah, serta dilandasi oleh kondisi transportasi yang masih menghadapi berbagai tantangan utama, khususnya terkait aspek keselamatan, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Fungsi Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau r*oadmap* yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan melalui tahapan sebagai berikut : 1) Persiapan penyusunan Renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai renstra PD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi 2) penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah meliputi penyusunan pohon kinerja, *cascading*, manajemen resiko dan penyusunan dokumen renstra 3) penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 5) perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan 6) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kab/Kota dan Renja PD sebagaimana bagan berikut.

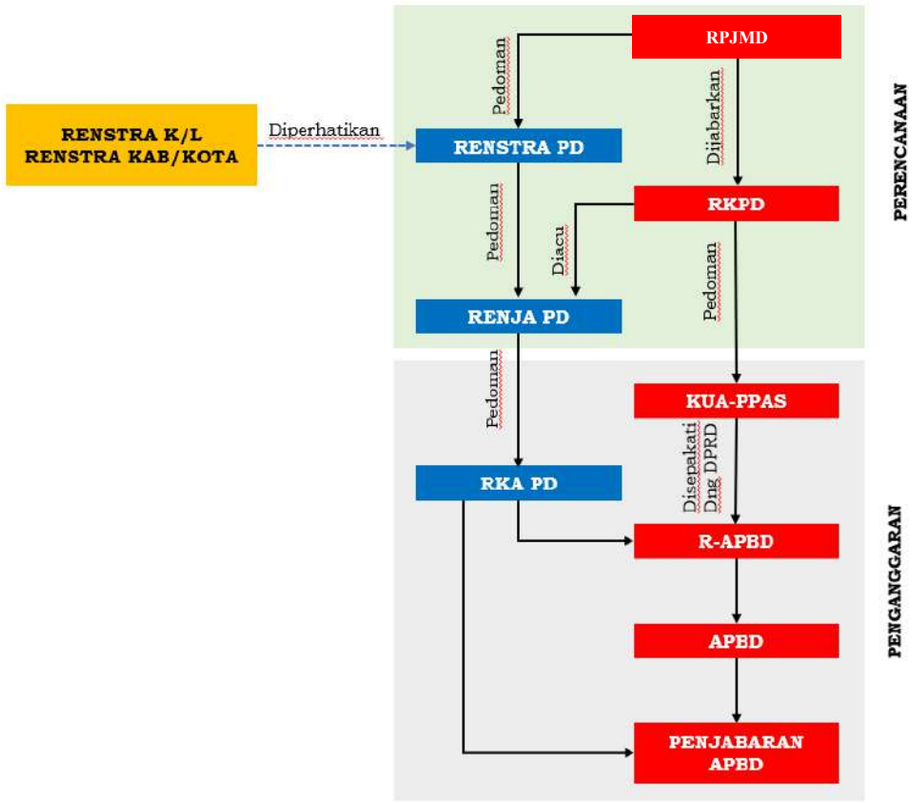

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Jateng, 2025

Gambar I.1. Gambar Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kab/Kota dan Renja PD

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta selaras dengan Renstra Kementerian Perhubungan 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman perencanaan lima tahunan perangkat daerah yang dijabarkan ke dalam Renja tahunan, kemudian dilanjutkan pada tahap penganggaran bersama DPRD.

Transportasi memiliki peran strategis dalam membangun konektivitas antarwilayah dan antarkawasan, sehingga mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, karena merupakan permintaan turunan dari aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, pariwisata, pendidikan, dan sektor strategis lainnya. Oleh karena itu, pembangunan transportasi harus inklusif, adaptif, serta mendukung daya saing daerah secara berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur perhubungan juga diarahkan untuk mengatasi kesenjangan sosial melalui penerapan prinsip *Gender Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Hal ini sejalan dengan pencapaian SDGs, khususnya tujuan kesetaraan gender, pengurangan kesenjangan, kota berkelanjutan, inovasi infrastruktur, dan penanganan perubahan iklim. Sektor transportasi juga berkontribusi pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, antara lain: Keselamatan transportasi yang rendah, ditandai tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat keterbatasan fasilitas keselamatan seperti rambu, marka, penerangan jalan, fasilitas penyeberangan, dan perlindungan bagi pengguna rentan. Aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah yang belum optimal, sehingga menurunkan efisiensi pergerakan orang dan barang serta berimplikasi pada aspek keselamatan. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jawa Tengah telah

menetapkan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023.

Untuk periode 2025–2029, Tujuan Pertama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kualitas layanan transportasi yang diarahkan untuk mendukung Sasaran Daerah Kedua, yaitu terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, Tujuan Kedua Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah yang berintegritas dan dinamis, yang ditujukan untuk mendukung Sasaran Daerah Pertama, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis. Kedua tujuan tersebut secara sinergis mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah, yaitu Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7095);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5236);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 279).Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
42. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 124);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6).
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);

45. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarus utamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
46. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2 ; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 165);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 171);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 172);
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
52. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
53. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 913);

55. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
56. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 813);
57. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1674);
58. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
59. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
60. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);
61. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
62. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 80);
63. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 22);
64. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 54)
65. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
66. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

67. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 Tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor);
68. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07 Tahun 2021 tentang Penetapan Trayek Pelayanan Angkutan Dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021);
69. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2/Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan rencana dan program / kegiatan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, serta menetapkan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029;
2. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
3. Dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah baik tahunan maupun sesuai periode jangka menengah (2025-2029).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Serta Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Tujuan Perangkat Daerah, Sasaran Perangkat Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah, Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

Lampiran 1) Pohon Kinerja;
2) Cascading Perangkat Daerah;
3) Manajemen Risiko.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, kedudukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2025 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam ketentuan tersebut, tidak terdapat perubahan kelembagaan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Menindak lanjuti hal tersebut telah disusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Dalam Rancangan Peraturan Gubernur tersebut dilakukan penyesuaian yaitu Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B dan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B, yang ditingkatkan statusnya menjadi Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A dan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A. Pada saat ini masih menunggu diterbitkanya Peraturan Gubernur terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, Bidang Pelayaran, Unit Pelaksana Teknis Daerah sebanyak 6 Balai Pengelola Sarana Prasana Perhubungan Wilayah, dan Balai Transporasi Jawa Tengah serta kelompok jabatan fungsional.

Adapun tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Lalu Lintas Jalan;
4. Bidang Angkutan Jalan;
5. Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian;
6. Bidang Pelayaran;
7. UPT Dinas; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

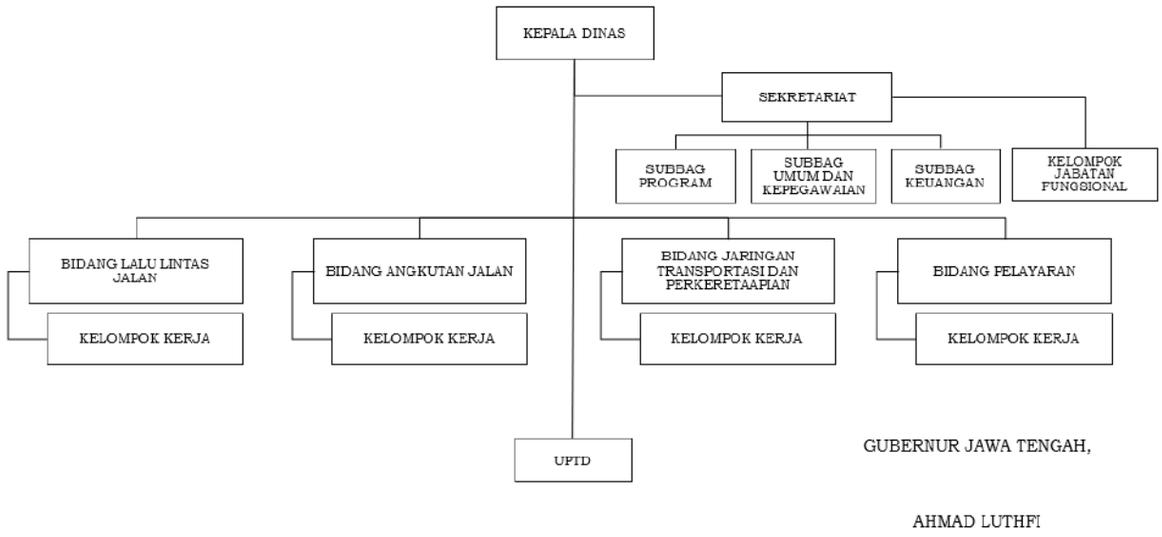

Sumber : Rapergub Jateng

Gambar II.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

A. Kepala Dinas

Adapun tugas pokok Kepala Dinas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah Daerah;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Lalu Lintas Jalan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan, Rekayasa Lalu Lintas Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Angkutan Jalan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi ;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi ;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi;
5. Pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan aglomerasi ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian

Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan, Perencanaan Transportasi, dan Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian
2. Pelaksanaan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian;
5. Pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang terminal penumpang, perencanaan transportasi dan perkeretaapian; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pelayaran

Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut, Kepelabuhanan, Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
5. Pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang angkutan laut, kepelabuhanan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Adapun Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki UPTD yaitu Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A serta Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A.

1. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A

   Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Balai tersebut dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

   Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A terdiri dari 6 Balai berdasarkan wilayah kerjanya, berikut pembagian wilayah kerja Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A :

   a. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A berkedudukan di Semarang dengan wilayah kerja 6 Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Pengembangan Kedungsepur : Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Kota Salatiga;
   b. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A berkedudukan di Pati dengan wilayah kerja 5 Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Pengembangan Jekuti : Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Wilayah Pengembangan Banglor : Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora;
   c. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A berkedudukan di Surakarta dengan wilayah kerja 7 Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Pengembangan Subosukowonosraten : Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali,

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten;

d. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A berkedudukan di Magelang dengan wilayah kerja 5 Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Pengembangan Keburejo : Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Wilayah Pengembangan Gelangmanggung : Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung;
e. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A berkedudukan di Banyumas dengan wilayah kerja 5 Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Pengembangan Wonobanjar : Kabupaten Wonosobo Kabupaten Banjarnegara, Wilayah Pengembangan Cibalingmas : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan;
f. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A berkedudukan di Pekalongan dengan wilayah kerja 7 Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Pengembangan : Bregasmalang : Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Wilayah Pengembangan Petanglong : Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang;

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
c. evaluasi, dan pelaporan bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
d. pengelolaan ketatausahaan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

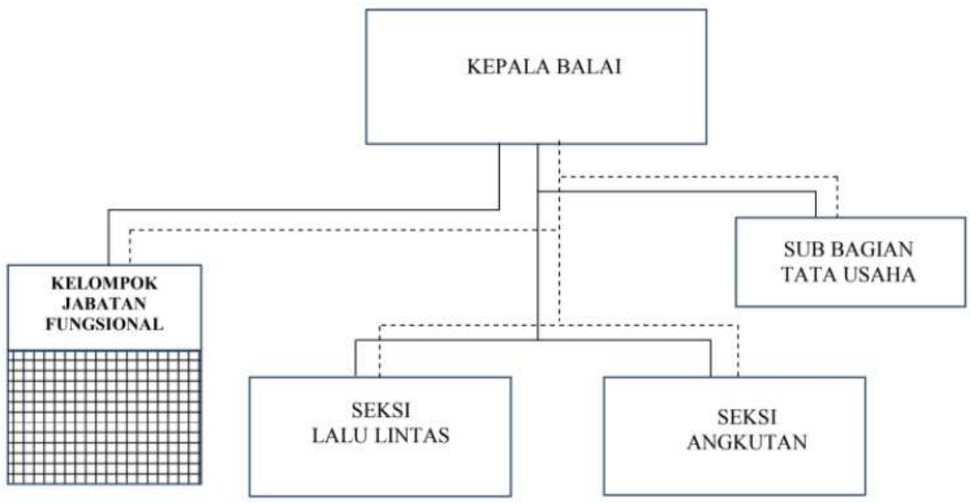

Sumber : Rapergub Jateng

Gambar II.2. Struktur Organisasi Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A

2. Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A

Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Angkutan Aglomerasi Perkotaan.

Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang sarana dan prasarana, dan operasional Angkutan Aglomerasi Perkotaan. Dalam melaksanakan tugas, Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A melaksanakan fungsi :

a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional Angkutan Aglomerasi Perkotaan;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional Angkutan Aglomerasi Perkotaan;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan operasional Angkutan Aglomerasi Perkotaan
d. Pengelolaan ketatausahaan dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

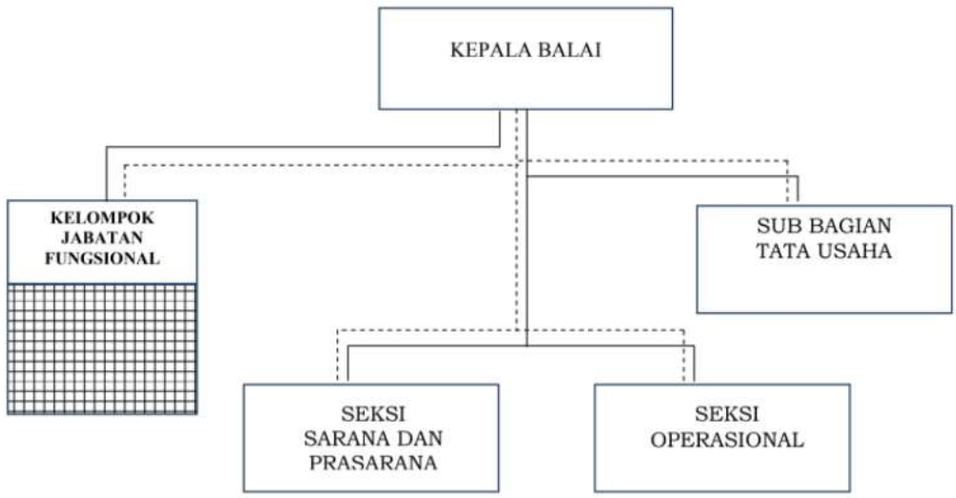

Sumber : Rapergub Jateng

Gambar II.3. Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tata laksana (proses,prosedur dan mekanisme) diantaranya peta proses bisnis dinas perhubungan yang saat ini masih dalam proses penyusunan (menyesuaikan renstra perangkat daerah) serta standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan diantaranya adalah :

1. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/182/2019 3 Mei 2019 tentang Standar Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah;
2. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/23/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Standar Operasional

Prosedur Sub Keuangan pada Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/21/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Program;
4. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/20/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 061/17.845 tanggal 1 November 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Persetujuan Teknis Analisis Dampak lalu Lintas di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 551.1/269/2021 tentang Standar Operasional Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 067/80/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Verivikasi Sertifikat Standart Pelaku Usaha Angkutan laut, Pelayaran Rakyat dan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan;
8. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 067/11/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng;
9. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 067/11/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
10. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 900.1.131/5/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Restribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
11. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 500.10.1/511/2024 tentang Standar Operasional Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin Lainya di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 500.11.7/690/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Fasilitas Perlengkapan Jalan;
13. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 500.11.8/342/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Rekomendasi Angkutan Umum.

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

A. Kondisi Infrastruktur Perhubungan

Dalam rangka mendukung visi Jawa Tengah sebagai provinsi maju, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan yang mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan keselamatan perjalanan, serta memperbaiki kualitas layanan angkutan umum. Upaya pembangunan sektor perhubungan diarahkan pada pengembangan jaringan transportasi yang terintegrasi, andal, inklusif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan aspek keselamatan sebagai

prioritas utama, hal ini diwujudkan melalui strategi peningkatan standar keselamatan transportasi, modernisasi angkutan umum, serta standarisasi simpul transportasi.

Dengan kebijakan tersebut, pembangunan sektor perhubungan di Jawa Tengah tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas orang, barang, dan jasa, tetapi juga menjamin keselamatan, keamanan, keterjangkauan, serta perlindungan bagi seluruh pengguna jalan dan transportasi. Lebih jauh, peningkatan kualitas perhubungan diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka akses ke pusat-pusat pertumbuhan baru, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Transportasi
   a. Angkutan Jalan

      Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diantaranya Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan tidak dalam trayek yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi diataranya taxi, angkutan sewa khusus dan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) serta pelayanan angkutan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi).

      1) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

         Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 551.2/321/2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuha Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Jawa Tengah terdapat 272 trayek AKDP dengan kebutuhan kendaraan sebanyak 6.442 kendaraan sedangkan jumlah kendaraan pada tahun 2024 sebanyak 3.434 kendaraan. Adapun data kendaraan dari Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.1. Jumlah Bus dan Jumlah Perusahaan AKDP Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan	Jumlah Perusahaan
BPSPP Wilayah I Kelas A			
1	Kab. Demak	69	3
2	Kab. Semarang	109	2
3	Kab. Grobogan	58	4
4	Kota Salatiga	33	2
5	Kota Semarang	57	10
6	Kab. Kendal	81	6
BPSPP Wilayah II Kelas A			
7	Kab. Blora	6	1
8	Kab. Rembang	20	1
9	Kab. Pati	43	2
10	Kab. Kudus	98	7
11	Kab. Jepara	107	6

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan	Jumlah Perusahaan
BPSPP Wilayah III Kelas A			
12	Kota Surakarta	107	9
13	Kab. Boyolali	76	9
14	Kab. Klaten	0	0
15	Kab. Sukoharjo	0	0
16	Kab. Wonogiri	84	8
17	Kab. Karanganyar	41	7
18	Kab. Sragen	34	7
BPSPP Wilayah IV Kelas A			
19	Kab. Kebumen	100	8
20	Kab. Purworejo	106	5
21	Kab. Magelang	79	11
22	Kab. Temanggung	216	2
23	Kota Magelang	47	4
BPSPP Wilayah V Kelas A			
24	Kab. Cilacap	63	10
25	Kab. Banyumas	302	15
26	Kab. Purbalingga	53	7
27	Kab. Banjarnegara	120	23
28	Kab. Wonosobo	315	11
BPSPP Wilayah VI Kelas A			
29	Kab. Batang	16	5
30	Kab. Pekalongan	176	5
31	Kab. Pemalang	169	5
32	Kab. Tegal	159	4
33	Kab. Brebes	153	6
34	Kota Tegal	155	4
34	Kota Pekalongan	182	5
Jumlah		3.434	214

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

2) Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Berdasarkan data tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah armada/kendaraan angkutan umum di Jawa Tengah menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah armada mencapai titik terendah yakni 1.921 unit. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan pembatasan mobilitas masyarakat serta menurunnya aktivitas operasional angkutan umum.

Memasuki periode 2021–2023, jumlah armada mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional serta mulai pulihnya mobilitas masyarakat. Namun, pada tahun 2024 jumlah armada kembali menurun menjadi 2.846 unit, turun dari tahun 2023 yang mencapai 3.096 unit. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum serta meningkatnya peralihan ke kendaraan pribadi, terutama setelah aksesibilitas jaringan jalan tol di Jawa Tengah semakin merata dan mudah dijangkau.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, mengingat ketersediaan dan keberlangsungan armada angkutan umum sangat berp`engaruh terhadap pelayanan transportasi publik,

pengurangan kemacetan, pengendalian emisi, serta keselamatan lalu lintas. Adapun data kendaraan dari Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel II.2. Jumlah Bus Operasional dan Bus Cadangan AKAP Di Provinsi Jawa Tengah

No	Tahun	Jumlah Bus AKAP				Jumlah Bus Cadangan
		Ekonomi		Non Ekonomi		
		Bus	Rit	Bus	Rit	
1	2020	601	1.201	1.320	2.641	216
2	2021	402	804	2 670	5 340	216
3	2022	436	872	2.660	5.320	216
4	2023	436	872	2.660	5.320	216
5	2024	580	580	2.266	2.266	160

Sumber : BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah, 2025

3) Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)

Pada tahun 2024, pelayanan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) di Jawa Tengah baru terealisasi pada 31 trayek dengan total 256 kendaraan. Padahal, kebutuhan ideal yang teridentifikasi mencapai 66 trayek dengan estimasi 969 kendaraan. Artinya, pemenuhan kebutuhan AJDP baru mencapai kurang dari separuh dari total yang direncanakan. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan trayek AJDP disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a) Tingkat kebutuhan mobilitas masyarakat yang belum merata, terutama di wilayah dengan aksesibilitas tinggi yang telah terlayani moda transportasi lain (jalan tol, KA, maupun angkutan daring).
b) Rendahnya minat operator swasta untuk membuka layanan trayek baru karena pertimbangan keekonomian, termasuk keterisian penumpang (load factor) yang belum stabil.
c) Belum terintegrasinya AJDP dengan moda transportasi lain, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Adapun rincian trayek tersebut sebagai berikut :

Tabel II.3. Layanan Trayek AJDP Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	KOTA ASAL TUJUAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI	RINCIAN KETETAPAN KEBUTUHAN ANGKUTAN AJDP			KODE PELAYANAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (ASAL-TUJUAN)
		JUMLAH KUOTA	SESUAI IJIN	SISA KUOTA	
I.	**REGULAR**				
1	Cilacap - Pemalang	12	0	12	233.0127-AJ
2	Cilacap - Purbalingga	14	4	10	233.0103-AJ
3	Cilacap - Kota Pekalongan	10	4	6	233.0175-AJ
4	Cilacap - Purwokerto	16	7	9	233.0102-AJ
5	Cilacap - Semarang	30	15	15	233.0174-AJ
6	Cilacap- Kota Tegal	10	1	9	233.0176-AJ
7	Cilacap - Purworejo	16	0	16	233.0106-AJ
8	Purwokerto - Surakarta	12	2	10	233.0272-AJ
9	Purwokerto - Semarang	95	30	65	233.0274-AJ
10	Purwokerto - Kota Pekalongan	20	4	16	233.0275-AJ
11	Purwokerto - Kota Tegal	12	0	12	233.0276-.AJ

NO	KOTA ASAL TUJUAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI	RINCIAN KETETAPAN KEBUTUHAN ANGKUTAN AJDP			KODE PELAYANAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (ASAL-TUJUAN)
		JUMLAH KUOTA	SESUAI IJIN	SISA KUOTA	
12	Semarang - Blora	30	9	21	233.7416-AJ
13	Semarang - Kota Tegal	10	10	0	233.7476-AJ
14	Semarang - Rembang	10	0	10	233.7417-AJ
15	Semarang - Surakarta	43	39	4	233.7472-AJ
16	Semarang - Purworejo	14	0	14	233.7406-AJ
17	Semarang - Wonogiri	20	0	20	233.7412-AJ
18	Temanggung - Purwokerto	10	0	10	233.2302-AJ
19	Temanggung - Semarang	10	0	10	233.2374-AJ
20	Pemalang - Surakarta	10	4	6	233.2772-AJ
21	Pati - Klaten	6	0	6	233.1810-AJ
22	Pati - Semarang	20	10	10	233.1874-AJ
23	Banjarnegara - Surakarta	10	0	10	233.0472-AJ
24	Banjarnegara - Semarang	20	6	14	233.0474-AJ
25	Kota Pekalongan - Semarang	14	0	14	233.7574-AJ
26	Kota Pekalongan - Surakarta	10	0	10	233.7572-AJ
27	Purbalingga - Semarang	12	10	2	233.0374-AJ
28	Purbalingga - Surakarta	16	1	15	233.0372-AJ
29	Brebes - Wonogiri	10	0	10	233.2912-AJ
30	Brebes - Purworejo	4	0	4	233.2906-AJ
31	Brebes - Semarang	15	5	10	233.2974-AJ
32	Surakarta - Cepu	10	0	10	233.7216-.AJ
33	Klaten - Semarang	14	2	12	233.1274-AJ
34	Wonogiri - Semarang	14	0	14	233.1274-AJ
35	Pekalongan - Semarang	14	0	14	233.2674-AJ
36	Karanganyar - Semarang	12	0	12	233.1374-.AJ
37	Kebumen - Semarang	14	3	11	233.0574-AJ
38	Sragen - Semarang	10	0	10	233.1474-AJ
39	Kota Tegal - Surakarta	14	0	14	233.7672-AJ
40	Sukoharjo - Pati	10	4	6	233.1118-AJ
41	Jepara - Sukoharjo	31	5	26	233.2011-AJ
42	Jepara - Surakarta	10	3	7	233.2072-AJ
43	Wonosobo - Semarang	10	0	10	233.0774-AJ
44	Wonosobo - Surakarta	12	0	12	233.0772-AJ
45	Wonosobo - Tegal	10	0	10	233.0776-AJ
46	Kudus - Wonosobo	6	0	6	233.1907-AJ
47	Semarang - Sukoharjo	10	4	6	233.0776-AJ
48	Purwokerto - Wonosobo	10	5	5	233.0776-AJ
II.	**DUKUNGAN KSPN**				
49	Semarang - Jepara	37	24	13	233.2074-AJ
51	Kota Magelang - Cilacap	10	1	9	233.7101-AJ
52	Kota Magelang - Banjarnegara	10	0	10	233.7104-AJ
53	Wonosobo - Cilacap	10	0	10	233.0701-AJ
54	Sragen - Kota Magelang	12	0	12	233.7414-AJ
56	Jepara - Kota Magelang	10	4	6	233.2002-.AJ
55	Jepara - Wonosobo	26	17	9	233.2009-AJ
57	Rembang - Magelang (Borobudur)	9	0	9	233.1708-AJ
58	Purwokerto - Kota Magelang	16	0	16	233.0271-AJ
59	Magelang - Kudus	6	0	6	233.0819-AJ
60	Magelang - Kota Tegal	12	4	8	233.0876-AJ
61	Magelang - Semarang	15	14	1	233.0874-AJ
62	Magelang - Surakarta	6	0	6	233.0874-AJ
63	Magelang - Wonosobo	10	0	10	233.0807-AJ
64	Pati - Magelang	6	0	6	233.1808-AJ
65	Cilacap - Jepara	10	5	5	233.0271-AJ
66	Jepara - Karanganyar	12	0	12	233.0819-AJ

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

4) Angkutan Tidak Dalam Trayek (Taksi dan Angkutan Sewa Khusus)

Pada Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah jumlah kendaraan untuk Taksi sebanyak 737 Kendaraan, dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) sebanyak 789 Kendaraan.

Adapun rincian per masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel II.4.
Jumlah Angkutan Taksi, Pariwisata dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) Per Kabupaten/Kota

Kab/Kota Pelayanan	Rincian Ketetapan Kebutuhan / Kuota Taksi			Kode Pelayanan Angkutan Taksi	Rincian Ketetapan Kebutuhan / Kuota Ask			Kode Pelayanan Angkutan Sewa Khusus
	Jumlah Kuota	Sesuai Ijin	Sisa Kuota		Jumlah Kuota	Sesuai Ijin	Sisa Kuota	
Kabupaten Kendal	31	0	31	233.24-TX.01	60	13	47	233.24-ASK.01
Kabupaten Demak	13	0	13	233.21-TX.01	50	13	37	233.21-ASK.01
Kabupaten Semarang (Ungaran)	5	0	5	233.22-TX.01	207	40	167	233.22-ASK.01
Kota Salatiga	18	0	18	233.73-TX.01	257	63	194	233.73-ASK.01
Kota Semarang	499	286	213	233.74-TX.01	3.010	294	2716	233.74-ASK.01
Kab.Grobogan (Purwodadi)	5	0	5	233.15-TX.01	30	1	29	233.15-ASK.01
Kabupaten Jepara	14	0	14	233.20-TX.02	68	0	68	233.20-ASK.02
Kabupaten Kudus	26	24	2	233.19-TX.02	120	0	120	233.19-ASK.02
Kabupaten Pati	12	5	7	233.18-TX.02	108	16	92	233.18-ASK.02
Kabupaten Rembang	5	0	5	233.17-TX.02	25	0	25	233.17-ASK.02
Kabupaten Blora	5	0	5	233.16-TX.02	25	0	25	233.16-ASK.02
Kota Surakarta	17	0	17	233.72-TX.03	937	28	909	233.72-ASK.03
Kabupaten Boyolali	115	100	15	233.09-TX.03	145	4	141	233.09-ASK.03
Kabupaten Sukoharjo	12	0	12	233.11-TX.03	90	3	87	233.11-ASK.03
Kabupaten Karanganyar	5	0	5	233.12-TX.03	35	9	26	233.12-ASK.03
Kabupaten Wonogiri	5	0	5	233.14-TX.03	75	2	73	233.14-ASK.03
Kabupaten Sragen	5	0	5	233.13-TX.03	50	3	47	233.13-ASK.03
Kabupaten Klaten	5	0	5	233.10-TX.03	80	3	77	233.10-ASK.03
Kabupaten Purworejo	52	39	13	233.06-TX.04	200	0	200	233.06-ASK.04
Kabupaten Wonosobo	30	27	3	233.07-TX.04	60	1	59	233.07-ASK.04
Kota Magelang	29	29	0	233.71-TX.04	125	7	118	233.71-ASK.04
Kabupaten Magelang	66	65	1	233.08-TX.04	177	42	135	233.08-.ASK.04
Kabupaten Temanggung	34	22	12	233.23-TX.04	91	12	79	233.23-ASK..04
Kabupaten Banjarnegara	25	25	0	233.049-TX.05	50	4	46	233.04-ASK.05
Kabupaten Purbalingga	30	30	0	233.03-TX.05	60	29	31	233.03-ASK.05
Kabupaten Banyumas	100	42	58	233.02-TX.05	384	142	242	233.02-ASK.05
Kabupaten Cilacap	32	0	32	233.01-TX.05	77	19	58	233.01-ASK.05
Kabupaten Kebumen	3	3	0	233.05-TX.05	63	1	62	233.05-ASK.05
Kota Pekalongan	24	24	0	233.75-TX.06	175	11	164	233.75-ASK.06
Kabupaten Batang	5	0	5	233.25-TX.06	100	5	95	233.25-ASK.06
Kabupaten Pekalongan	5	0	5	233.26-TX.06	102	14	88	233.26-ASK.06
Kabupaten Brebes	5	0	5	233.29-TX.06	189	1	188	233.29-ASK.06
Kabupaten Tegal	7	7	0	233.76-TX.06	280	0	280	233.76-ASK06
Kota Tegal	10	9	1	233.28-TX.06	174	0	174	233.28-ASK.06
Kabupaten Pemalang	5	0	5	233.27-TX.06	150	9	141	233.27-ASK.06
JUMLAH	1.259	737	522		7.829	789	7.040	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dari tabel diatas diperoleh gambaran daerah perkotaan besar dan pusat pertumbuhan (Semarang, Salatiga, Kudus, Banyumas) masih membutuhkan percepatan perizinan dan optimalisasi layanan taksi, karena kebutuhan lebih tinggi dibandingkan realisasi izin sedangkan terkait angkutan sewa khusus hampir di seluruh wilayah belum terpenuhi secara signifikan. Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan berbagai macam strategi melalui percepatan perizinan, mendorong investasi operator, serta integrasi dengan layanan angkutan umum massal.

5) Angkutan Pedesaan

Angkutan pedesaan adalah angkutan pada jaringan trayek pedesaan yang melayani suatu kawasan pedesaan dan

tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. Dalam Hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan terhadap jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa angkutan pedesaan lintas wilayah perbatasan di Jawa Tengah saat ini belum tersedia. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk kondisi jaringan jalan yang sebagian besar hanya dapat dilalui oleh Mobil Penumpang Umum (MPU). Selain faktor teknis tersebut, keberlangsungan angkutan pedesaan juga sangat dipengaruhi oleh aspek keekonomian penyelenggara. Rendahnya jumlah penumpang, tingginya biaya operasional kendaraan, serta terbatasnya dukungan insentif membuat banyak operator angkutan pedesaan mengalami kesulitan untuk menjaga keberlanjutan layanan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, saat ini sedang dilakukan survey lapangan guna memetakan kondisi eksisting serta kebutuhan rill angkutan pedesaan lintas kabupaten/kota di Jawa Tengah. Adapun trayek Angkutan pedesaan di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan analisa awal kebutuhan adalah sebagai berikut:

Tabel II.5. Kebutuhan Trayek Angkutan Pedesaan Yang Melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi

No	TRAYEK	Keterangan
1	Terminal Boja (Kendal) – Limbangan – Sumowono (Kab. Semarang)	Kab.Kendal dan Kab. Semarang
2	Bringin (Kab Semarang) – Ngajaran – Pringapus – Mendiro –Kawengen - Banyumeneng (Kab Demak)	Kab. Semarang, Kab. Demak
3	Terminal Tingkir (Salatiga) – Suruh – Karanggede – Waduk Kedungombo (Kab. Boyolali)	Kota Salatiga, Kab. Boyolali
4	Godong (Kab Grobogan) – Karangrayung – Juwangi – Waduk Kedungombo (Kab. Boyolali)	Kab. Grobogan, Kab. Boyolali
5	Majenang - Salem	Kab. Cilacap, Kab. Brebes
6	T. Juwana (tipe c) -Jakenan-Pucakwangi-Todanan-Terminal Ngawen (tipe c)	Kab. Pati, Kab. Blora
7	T. Lasem(tipe c)-Pamotan-T.Jatirogo (tipe c)	Kab. Rembang, Kab. Tuban
8	Terminal Watu Kelir (Kab Sukoharjo) – Pasar Krisak (Kab Wonogiri)	Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri
9	Solo – Sukoharjo – Songgorunggi – Mento – Klerong – Jatipuro – Jatiyoso (Kab Karanganyar)	Kota Surajarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar
10	Jatisrono (Kab Wonogiri) - Jatipuro (Kab. Karanganyar)	Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar
11	Sragen -Ngawi	Kab. Sragen, Kab. Ngawi
12	Sawangan (Kab Magelang) - Selo (Kab Boyolali)	Kab. Magelang, Kab. Boyolsli
13	Muntilan (Kab Magelang) – Ngluwar – Bligo – Salam – Tempel - Jombor (Yogya)	Kab. Magelang, Jogja
14	Kaloran (Kab Temanggung) – Sumowono (Kab Semarang)	Kab. Temanggung, Kab. Semarang
15	Sapuran (Kab Wonosobo) – Kepil – Bruno (Kab Purworejo)	Kab. Wonosobo, Kab. Purworejo
16	Majenang (Kab Cilacap) – Salem (Kab Brebes)	Kab. Cilacap, Kab. Brebes
17	Sokaraja (Kab Banyumas) - Kemangkon – Bukateja (Kab Pubalingga)	Kab. Banyumas, kab. Purbalingga
18	Wanayasa (Kab Banyumas) - Batur - Dieng - Batas Wonosobo	Kab. Banyumas, Kab. Wonosobo
19	Gambar II.4. Baturaden (Kab Bayumas) – Serang Kab Purbalingga	Kab. Banyumas, kab. Purbalingga
20	Jatibarang - Balapulang	Kab. Brebes, Kab. Tegal

No	TRAYEK	Keterangan
21	Pekalongan - Batang - Tulis - Bandar	Kota Pekalongan, Kab. Batang
22	Ketanggungan - Jatibarang - Slawi	Kab. Brebes, Kab. Tegal
23	Jatibarang - Margasari	Kab. Brebes, Kab. Tegal

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

b. Terminal Penumpang Tipe B

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Di Jawa Tengah dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah berjumlah 24 terminal. Adapun berikut persebaran Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah :

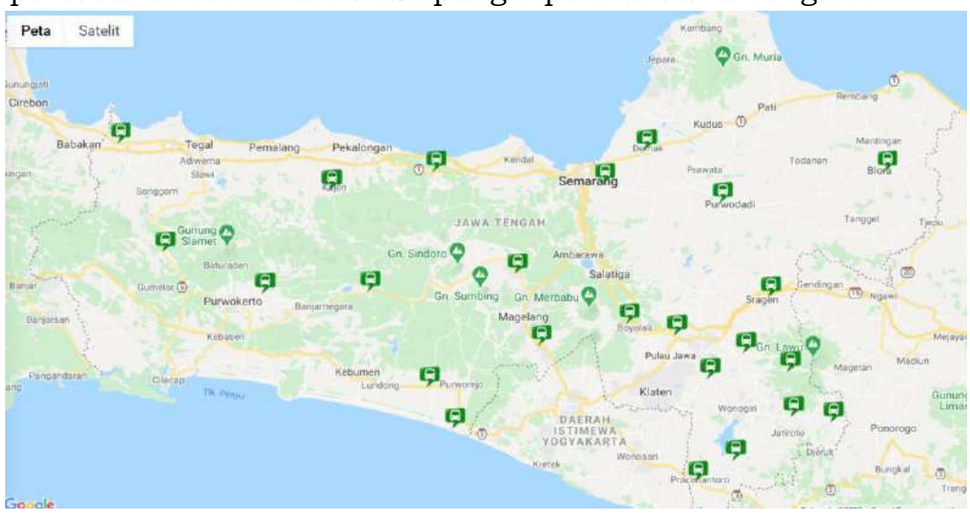

Sumber : http://gis.perhubungan.jatengprov.go.id/, 2024

Gambar II.5. Persebaran Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah

Namun demikian dari 24 Terminal Penumpang Tipe B dimaksud pada SK Gubernur yang beroperasional sebanyak 23 Terminal, dikarenakan Terminal Nampurejo sudah tidak beroperasi setelah mulai beroperasional Terminal Kutoarjo (saat ini masih dalam proses revisi SK Gubernur). Selain itu terdapat 1 terminal yang tidak layak yaitu Terminal Bintoro. Di sisi lain dari 23 Terminal Penumpang Tipe B yang beroperasi terdapat 3 terminal yang status asetnya belum sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel II.6. Kondisi Infrastruktur Simpul Terminal Penumpang Tipe B

No	Nama Terminal	Kab / Kota	Kondisi	Status Aset
BPSPP Wilayah I				
1	Penggaron	Kota Semarang	Layak Operasi	Milik Pemprov
2	Purwodadi	Kab. Grobogan	Layak Operasi	Milik Pemprov

No	Nama Terminal	Kab / Kota	Kondisi	Status Aset
3	Bintoro	Kab. Demak	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT KAI
BPSPP Wilayah II				
4	Gagak Rimang	Kab. Blora	Layak Operasi	Milik Pemprov
BPSPP Wilayah III				
5	Penggung	Kab. Boyolali	Layak Operasi	Milik Pemprov
6	Pilangsari	Kab. Sragen	Layak Operasi	Milik Pemprov
7	Tegalgede	Kab. Karanganyar	Layak Operasi	Milik Pemprov
8	Tawangmangu	Kab. Karanganyar	Layak Operasi	Milik Pemprov
9	Jatisrono	Kab. Wonogiri	Layak Operasi	Milik Pemprov
10	Baturetno	Kab. Wonogiri	Layak Operasi	Milik Pemprov
11	Pracimantoro	Kab. Wonogiri	Layak Operasi	Milik Pemprov
12	Purwantoro	Kab. Wonogiri	Layak Operasi	Milik Pemprov
13	Kartosuro	Kab. Sukoharjo	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso
14	Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	Layak Operasi	Milik Pemprov
BPSPP Wilayah IV				
15	Madureso	Kab. Temanggung	Layak Operasi	Milik Pemprov
16	Drs. Prayitno	Kab. Magelang	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT KAI
17	Kutoarjo	Kab. Purworejo	Proses Pembangunan	Milik Pemprov
18	Nampurejo	Kab. Purworejo	Saat ini sudah tidak beroperasi setelah Terminal Kutoarjo beroperasi (Menunggu revisi SK Gubernur)	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso (sudah tidak beroperasi dari tahun 2022)
BPSPP Wilayah V				
19	Banjarnegara	Kab. Banjarnegara	Layak Operasi	Milik Pemprov
20	Purbalingga	Kab. Purbalingga	Layak Operasi	Milik Pemprov
BPSPP Wilayah VI				
21	Banyuputih	Kab. Batang	Layak Operasi	Milik Pemprov
22	Kajen	Kab. Pekalongan	Layak Operasi	Milik Pemprov
23	Bumiayu	Kab. Brebes	Layak Operasi	Milik Pemprov
24	Tanjung	Kab. Brebes	Layak Operasi	Milik Pemprov

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Selain itu pada Tahun 2024 dilakukan survay Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada Terminal Penumpang Tipe B mendasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel II.7. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan (SPP) Terminal Penumpang Tipe B Tahun 2024

No	Terminal	Kab/Kota	% Pemenuhan SPP Terminal Penumpang Tipe B					
			Ketersediaan Sarana Prasarana		Kondisi Sarana Prasarana			
			Ada	Tidak Ada	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
BPSPP Wilayah I								
1	Penggaron	Kota Semarang	60,79%	39,21%	48,29%	41,67%	6,62%	3,42%
2	Purwodadi	Kab. Grobogan	72,22%	27,78%	29,06%	32,48%	7,69%	30,77%
3	Bintoro	Kab. Demak	43,91%	56,09%	15,13%	18,76%	1,15%	64,96%
BPSPP Wilayah II								
4	Gagak Rimang	Kab. Blora	65,49%	34,51%	39,06%	23,68%	5,64%	31,62%
BPSPP Wilayah III								
5	Penggung	Kab. Boyolali	50,11%	49,89%	30,56%	64,96%	4,49%	0,00%
6	Pilangsari	Kab. Sragen	55,34%	44,66%	31,20%	63,93%	4,36%	0,51%
7	Kartosuro	Kab. Sukoharjo	48,21%	51,79%	23,93%	70,04%	4,87%	1,15%
8	Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	53,95%	46,05%	31,28%	64,23%	4,49%	0,00%
9	Tegalgede	Kab. Karanganyar	47,46%	52,54%	20,85%	23,72%	0,64%	54,79%

No	Terminal	Kab/Kota	% Pemenuhan SPP Terminal Penumpang Tipe B					
			Ketersediaan Sarana Prasarana		Kondisi Sarana Prasarana			
			Ada	Tidak Ada	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
10	Tawangmangu	Kab. Karanganyar	43,27%	56,73%	22,09%	73,42%	3,21%	1,28%
11	Baturetno	Kab. Wonogiri	50,75%	49,25%	30,77%	64,23%	4,36%	0,64%
12	Jatisrono	Kab. Wonogiri	53,10%	46,90%	34,62%	18,29%	4,36%	42,74%
13	Pracimantoro	Kab. Wonogiri	49,04%	50,96%	29,06%	26,71%	3,21%	41,03%
14	Purwantoro	Kab. Wonogiri	50,64%	49,36%	27,56%	21,15%	3,21%	48,08%
BPSPP Wilayah IV								
15	Madureso	Kab. Temanggung	53,95%	46,05%	48,25%	45,26%	0,51%	5,98%
16	Drs. Prayitno	Kab. Magelang	49,04%	50,96%	41,20%	53,80%	4,36%	0,64%
17	Kutoarjo	Kab. Purworejo	69,23%	30,77%	60,68%	11,54%	0,00%	27,78%
18	Nampurejo	Kab. Purworejo	Proses penghapusan dan saat ini sudah tidak operasi					
BPSPP Wilayah V								
19	Banjarnegara	Kab. Banjarnegara	54,27%	45,73%	24,79%	37,39%	3,21%	34,62%
20	Purbalingga	Kab. Purbalingga	55,45%	44,55%	37,82%	58,33%	3,85%	0,00%
BPSPP Wilayah V								
21	Banyuputih	Kab. Batang	56,84%	43,16%	41,20%	42,91%	4,36%	11,54%
22	Kajen	Kab. Pekalongan	61,86%	38,14%	38,63%	56,37%	4,36%	0,64%
23	Tanjung	Kab. Brebes	48,93%	51,07%	49,06%	35,04%	4,36%	11,54%
24	Bumiayu	Kab. Brebes	43,70%	56,30%	40,17%	53,21%	5,98%	0,64%
Rata-rata Jawa Tengah			51,56%	44,27%	33,14%	41,71%	3,72%	17,27%

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Rata-rata tingkat pemenuhan sarana prasarana mendasarkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan (SPP) Terminal Penumpang Angkutan Jalan untuk 6 aspek (pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan / keteraturan, kenyamanan, kemudahan / keterjangkauan dan kesetaraan) pada Tahun 2024 sebesar 51,56%. Adapun rata-rata kondisi sarana prasarana eksisting Terminal Penumpang Tipe B pada Tahun 2024 dalam kondisi baik sebesar 33,14%.

Sedangkan jumlah kendaraan masuk di Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2024 sebanyak 349.167 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan bus besar dengan jumlah 207.568 kendaraan. Terminal dengan jumlah kendaraan masuk terbanyak ada di terminal Tipe B Purbalingga sebanyak 49.434 kendaraan.

Tabel II.8. Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2024

No.	**Nama Terminal**	**Kabupaten / Kota**	**Kendaraan Masuk**				
			Bis Besar	**Bis Sedang**	**Bis Kecil**	**Mobil Penumpang Umum**	**Jumlah**
1	Purbalingga	Purbalingga	8.939	45.675	3.633	31.871	90.118
2	Sukoharjo	Sukoharjo	17.697	35.056	-	1.091	53.844
3	Purwodadi	Grobogan	18.186	21.482	-	-	39.668
4	Banjarnegara	Banjarnegara	7.560	5.484	17.868	-	30.912
5	Pilangsari	Kab. Sragen	23.058	1	830	-	23.889
6	Penggaron	Kota Semarang	2.292	15.940	574	1.538	20.344
7	Kartosuro	Sukoharjo	19.498	4	-	4	19.506
8	Dr. Prayitno Muntilan	Kab. Magelang	11.022	1.988	4.199	-	17.209
9	Kutoarjo	Purworejo	-	15.251	-	-	15.251
10	Madureso	Temanggung	7.562	7.433	228	-	15.223
11	Jatisrono	Kab. Wonogiri	14.447	-	-	-	14.447

No.	Nama Terminal	Kabupaten / Kota	Kendaraan Masuk				
			Bis Besar	Bis Sedang	Bis Kecil	Mobil Penumpang Umum	Jumlah
12	Purwantoro	Kab. Wonogiri	13.430	-	-	-	13.430
13	Penggung	Kab. Boyolali	13.077	-	-	-	13.077
14	Banyuputih	Batang	2.577	3.577	4.527	-	10.681
15	Bintoro	Kab. Demak	6.408	1.968	2.081	-	10.457
16	Tanjung	Brebes	7.339	-	2.929	-	10.268
17	Bumiayu	Brebes	7.210	1.579	-	-	8.789
18	Tegalgede	Karanganyar	2.565	2.150	374	3.106	8.195
19	Kajen	Kab. Pekalongan	5.017	686	2.491	-	8.194
20	Tawangmangu	Karanganyar	755	2.567	1.761	2.431	7.514
21	Pracimantoro	Kab. Wonogiri	6.513	842	-	-	7.355
22	Baturetno	Kab. Wonogiri	6.071	1.237	-	-	7.308
23	Gagak Rimang	Kab. Blora	6.345	-	-	-	6.345
24	Nampurejo	Purworejo	-	-	-	-	-
	JUMLAH		207.568	162.920	41.495	40.041	452.024

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam mendukung peningkatan konektivitas dan aksesibilitas direncanakan penuntasan pembangunan terminal Tipe B Kutoarjo Kabupaten Purworejo, peningkatan Terminal Tipe B Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, Terminal Tipe B Madureso Kabupaten Magelang, Terminal Tipe B Banyuputih Kabupaten Batang, Kabupaten Sukoharjo, Terminal Tipe B Penggaron Kota Semarang, Terminal Purbalingga Kabupaten Purbalingga dan Terminal Bumiayu Tipe B di Kabupaten Brebes serta pemeliharaan pada semua terminal tipe B di Jawa Tengah.

Selain itu Pada Tahun 2023 telah disusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ), dimana dalam salah satu rekomendasinya adalah pembangunan simpul transportasi Terminal Penumpang Tipe B.

Tabel II.9. Indikasi Rencana Kebutuhan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Jumlah (Terminal)	Keterangan
1	Kab Tegal	1	Belum mempunyai Terminal Tipe A dan Tipe B
2	Kab. Kendal	1	Belum mempunyai Terminal Tipe A dan Tipe B
3	Kab. Rembang	1	Belum mempunyai Terminal Tipe A dan Tipe B
4	Kab. Pati	1	Belum mempunyai Terminal Tipe A dan Tipe B
5	Kab. Jepara	1	Belum mempunyai Terminal Tipe A dan Tipe B
6	Kab. Cilacap	1	Sudah mempunyai Terminal Tipe A di Cilacap bagian Timur namun belum mengakomodir Cilacap Bagian Barat
7	Kab. Banyumas	1	Sudah mempunyai Terminal Tipe A di Wilayah Perkotaan namun belum mengakomodir Banyumas Bagian Barat
Jumlah		7	

Sumber : RIJLLAJ, 2023

Hal tersebut selaras dengan Dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah dimana jumlah dan persebaran terminal tipe A dan tipe B belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2024 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 5 kabupaten/kota dan tipe B di 6 kabupaten/kota.

Tabel II.10. Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Eksisting	RTRW Provinsi	Eksisting	RTRW Provinsi
	Kedungsepur				
1	Kab. Kendal				Ada (P)
2	Kab. Demak	Demak*	Ada	Bintoro	
3	Kab. Semarang	Bawen	Ada		
4	Kota Semarang	Mangkang	Ada	Penggaron	Ada
5	Kota Salatiga	Tingkir	Ada		
6	Kab. Grobogan			Purwodadi	Ada
	Subosukowonosraten				
7	Kab. Sukoharjo			Kartosuro, Sukoharjo	Ada
8	Kab. Boyolali			Penggung	Ada
9	Kota Surakarta	Tirtonadi	Ada		
10	Kab. Karanganyar			Tegalgede, Tawangmangu	Ada
11	Kab. Wonogiri	Giri Adipura	Ada	Jatisrono, Pracimantoro, Purwantoro, dan Baturetno	Ada
12	Kab. Sragen		Ada (B)	Pilangsari	Ada
13	Kab. Klaten	Ir. Soekarno	Ada		
	Cibalingmas				
14	Kab. Purbalingga	Bobotsari	Ada	Purbalingga	Ada
15	Kab. Banyumas	Purwokerto	Ada		Ada*
16	Kab. Cilacap	Bangga Bangun Desa	Ada		Ada* (B)
	Bregasmalang				
17	Kab. Brebes			Bumiayu dan Tanjung	Ada
18	Kab. Tegal		Ada* (B)		Ada
19	Kota Tegal	Tegal	Ada		
20	Kab. Pemalang	Induk Pemalang	Ada		Ada
	Petanglong				
21	Kab. Pekalongan		Ada* (B)	Kajen	Ada
22	Kab. Batang			Banyuputih	Ada
23	Kota Pekalongan	Pekalongan	Ada		
	Wonobanjar				
24	Kab. Banjarnegara			Banjarnegara	
25	Kab. Wonosobo	Mendolo	Ada		
	Keburejo				
26	Kab. Kebumen	Kebumen	Ada		
27	Kab. Purworejo	Purworejo	Ada	Kutoarjo* dan Nampurejo**	Ada
	Gelangmanggung				
28	Kab. Magelang		Ada* (B)	Drs. Prayitno	Ada
29	Kota Magelang	Tidar	Ada		
30	Kab. Temanggung			Madureso	Ada
	Jekuti				
31	Kab. Jepara		Ada		
32	Kab. Kudus	Jati	Ada		
33	Kab. Pati		Ada* (B)		
	Banglor				
34	Kab. Rembang				Ada (P/B)
35	Kab. Blora	Cepu	Ada	Gagak Rimang	Ada

Sumber: RIJLLAJ DISHUB JATENG 2023 & PERDA NO 8 2024 RTRW

Catatan : B = Pembangunan, P = Peningkatan/Pengembangan

Pada Tahun 2025 Terminal Bintoro di Kabupaten Demak direncanakan akan tutup operasional, dikarenakan sudah terdapat Terminal A di Kabupaten Demak serta lahan yang dipakai Terminal Bintoro saat ini merupakan asset dari PT KAI.

Terkait dengan peningkatan konektivitas provinsi perlu adanya peningkatan terminal tipe C menjadi Terminal tipe B baik secara dokumen perencanaan Kab/Kota (RTRW Kab/Kota) dan realisasi dari dokumen tersebut. Hal tersebut sebagai sinergi pengembangan kawasan utamanya Peningkatan Terminal Tipe C Kabupaten Cilacap.

c. Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Sampai dengan Tahun 2024 sudah 5 Wilayah Pengembangan (7 koridor) dilayani Trans Jateng, yaitu : Wilayah Pengembangan Kedungsepur 2 koridor (Semarang-Bawen, Semarang-Kendal dan Semarang – Purwodadi (Gubug), Wilayah Pengembangan Cibalingmas 1 koridor (Purwokerto-Purbalingga) Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten 2 koridor (Surakarta-Sragen, Wonogiri-Surakarta) dan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung&Keburejo 1 koridor (Kutoarjo-Borobudur).

Sejalan dengan hal tersebut, layanan Trans Jateng juga berperan penting dalam mendukung implementasi Perda Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, dengan menghadirkan transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, serta inklusif. Kehadiran Trans Jateng diharapkan dapat memperluas akses mobilitas yang setara bagi perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, sehingga prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dapat terintegrasi dalam pencapaian target pembangunan transportasi daerah sesuai dengan arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu untuk mendukung Perpres 79/2019 terkait dengan kebutuhan Angkutan Aglomerasi Perkotaan mendukung Kawasan Industri Brebes dibutuhkan kajian pengembangan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bregasmalang. Selain itu dengan terbitnya Perpres 109/2020 utamanya Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang diperlukan kajian pengembangan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Petanglong serta rencana integrasi layanan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans jateng Wilayah Pengembangan Kedungsepur dan Petanglong. Untuk Wilayah Pengembangan Petanglong sendiri sudah dilakukan kajian Studi Kelayakan Layanan Angkutan Masal Aglomerasi Perkotaan di wilayah Pengembangan Petanglong pada TA. 2024 dengan rekomendasi 4 Trayek diantaranya yaitu Koridor I Pekalongan - Wiradesa – Kajen, Koridor II Pekalongan – Kedungwuni - Kajen, Koridor III Pekalongan – batang – Banyuputih - Limpung, Koridor IV Weleri - Banyuputih (penghubung Antar WP Kedungsepur dan Petanglong). berikut detail koridor di masing – masing Wilayah Pengembangan :

Tabel II.11. Koridor Pengembangan Angkutan Umum di Kawasan Aglomerasi Perkotaan

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek	Panjang Trayek (Km)	Jumlah Bus	Jumlah Shelter Terbangun	Kebutuhan Shelter	Ket
1	KEDUNGSEPUR (Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi)	1. Semarang – Bawen (Stasiun Tawang-T.Bawen)	45	28	92	94	Op. 7 Juli 2017
		2. Semarang – Kendal (T.Mangkang-RTH Weleri)	37,8	16	53	53	Op. 28 Oktober 2019 Penambahan 2 Unit armada pada tahun 2024
		3. Semarang – Demak	33	-	-	-	-
		4. Semarang – Grobogan (Gubug)	50,2	14	23	69	(Op.13 Oktober 2021)
2	SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)	5. Boyolali – Surakarta	29,9	-	-		
		6. Surakarta – Sragen (T. Tirtonadi-Sumberlawang Via Sangiran)	35	14	25	85	Op. 3 September 2020
		7. Surakarta – Karanganyar	18,3	-	-	-	-
		8. Surakarta – Wonogiri	42	15	62	122	Op 8 Agustus 2023 Penambahan armada 1 Unit tahun 2024
		9. Sukoharjo – Klaten	28,4	-	-	-	-
3	BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen)	10. Purwokerto – Purbalingga (T.Bulupitu-T.Bukateja)	42	14	61	62	Op. 13 Agus. 2018
		11. Purwokerto – Wangon	32,8	-	-	-	-
4	PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kab. Magelang, Temanggung	12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur)	42	-	-	-	-
		13. Terminal Secang – Terminal Parakan	23,5	-	-	-	-
		14. St. Kutoarjo – Borobudur	50	14	34	49	Op. 1 Sep. 2020
5	PETANGLONG (Kota Pekalongan; Kab. Pekalongan, Kab. Batang	15. Pekalongan – Kajen	26,9	-	-	-	-
		16. Banyuputih – Batang	30	-	-	-	-
		17. Limpung – Banyuputih dan KIT Batang – Banyuputih	6,6 dan 12,9	-	-	-	-
		18. Weleri – Banyuputih (penghubung Antar WP Kedungsepur dan Petanglong)	17,3	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Mulai Tahun 2025 penumpang Trans Jateng dikategorikan menjadi 6 (enam) yaitu penumpang umum, pelajar, buruh, lansia, disabilitas dan veteran. Sampai dengan Tahun 2024 Trans jateng sudah mengangkut/melayani 36.301.982 orang. Adapun rincian perkembangan jumlah penumpang masing-masing koridor Trans Jateng sebagai berikut :

Tabel II.12. Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Masing-Masing Koridor 2017-2024

No	Wilayah Pengembangan / Koridor TransJateng	Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang)							
		2017 – 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2017-2024
	Kedungsepur								
1.	T. Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017)	2.611.014	2.117.390	1.054.091	1.136.921	1.686.921	1.954.632	2.024.614	12.585.583
2.	T. Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019). Diperpanjang ke Weleri (Agus. 2022)	-	178.943	592.411	682.477	1.235.294	1.479.581	1.583.926	5.752.632
3.	T. Penggaron – T. Godong – T. Gubug (Okt.2021)	-	-	-	133.380	774.188	925.977	1.117.710	2.951.255
	Barlingmascakeb								
4.	Purwokerto – Purbalingga (Agus. 2018)	351.896	1.141.126	613.804	673.120	1.261.351	1.344.065	1.435.938	6.821.300
	Subosukowonosraten								
5.	Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020)	-	-	55.442	327.786	676.153	810.218	883.874	2.753.473
6.	Tirtonadi – Wonogiri (Agustus 2023)	-	-	-	-	-	471.794	1.345.894	1.817.688
	Purwomanggung								
7.	Kutoarjo – Borobudur (September 2020)	-	-	106.124	485.848	872.555	1.047.738	1.107.786	3.620.051
	Total 7 Koridor	**2.962.910**	**3.437.459**	**2.421.872**	**3.439.532**	**6.506.462**	**8.034.005**	**9.499.742**	**36.301.982**

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

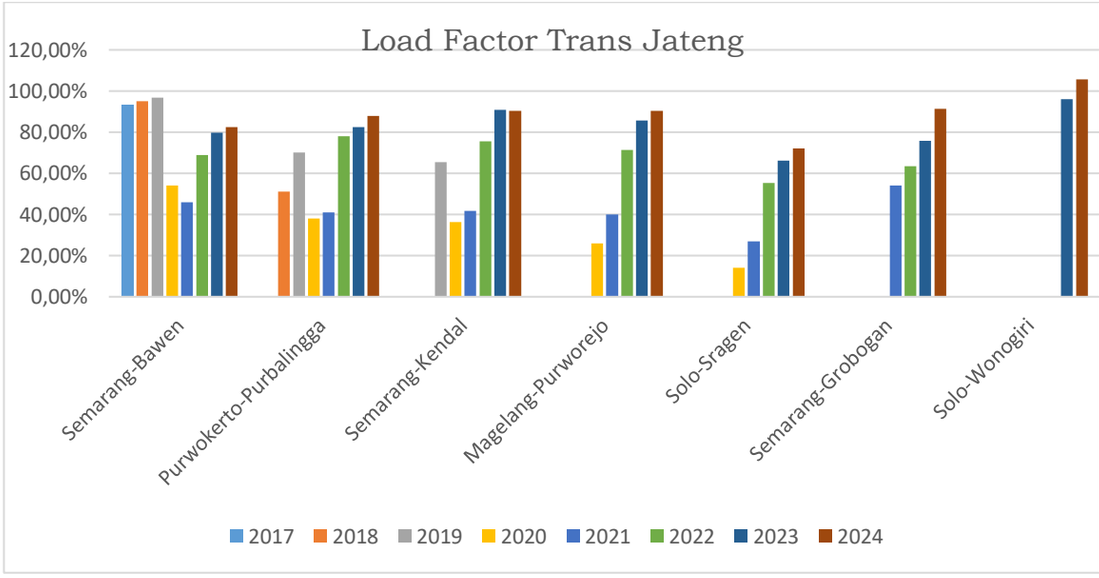

Sumber : Dinas Perhubungan 2025

Gambar II.6. Load Factor Penumpang Trans Jateng 2017-2024

Pada tahun 2021, mulai dilakukan survey perhitungan jumlah perpindahan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) untuk mengetahui kontribusi Trans Jateng dalam meningatkan jumlah pengguna angkutan umum perkotaan. Sebagaimana hasil survey Kepuasan Masyarakat terdapat perpindahan moda sebesar 52,22%.

Tabel II.13. Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Pelayanan Trans Jateng Tahun 2021 – 2024

No.	Koridor	Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng (%)			
		2021	2022	2023	2024
1.	Semarang-Bawen	43,79	46,06	44,66	44,44
2.	Purwokerto-Purbalingga	59,05	52,81	50,14	50,86
3.	Semarang-Kendal	36,94	41,21	50,29	49,72
4.	Kutoarjo-Borobudur	43,22	47,84	44,57	56,47
5.	Solo-Sangiran Via Sumberlawang	49,28	48,16	55,03	58,23
6.	Semarang-Gubug Via Godong	-	56,15	56,80	53,89
7.	Solo – Sukoharjo – Wonogiri	-	-	-	52,84
Persentase Total Perpindahan Kendaraan Pribadi ke Trans Jateng		**46,39**	**48,16**	**50,12**	**52,35**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Layanan Trans Jateng memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, salah satunya adalah berkurangnya beban biaya transportasi harian. Penghematan tersebut dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih produktif, sehingga turut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng tanggal 30 April 2025, telah menetapkan penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp 1.000,- (Pelajar, Buruh, Veteran, Lansia, Disabilitas). Kebijakan ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik yang terjangkau, tetapi juga selaras dengan rencana aksi penanggulangan kemiskinan, yang menjadi salah satu fokus utama arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah. Bagi pemerintah terdapat penghematan anggaran yang dikeluarkan terkait bahan bakar yang bersubsidi. Penghematan konsumsi bahan bakar selain bermanfaat untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup juga untuk memenuhi prioritas pembangunan lain. Kebijakan penurunan tarif yang mulai diberlakukan pada 15 Juni 2025 memberikan dampak yang berbeda terhadap jumlah penumpang Trans Jateng. Pada kategori penumpang umum, kebijakan ini hanya sedikit berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengguna kategori umum, sementara pada kategori pelajar dan lansia terjadi peningkatan signifikan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :

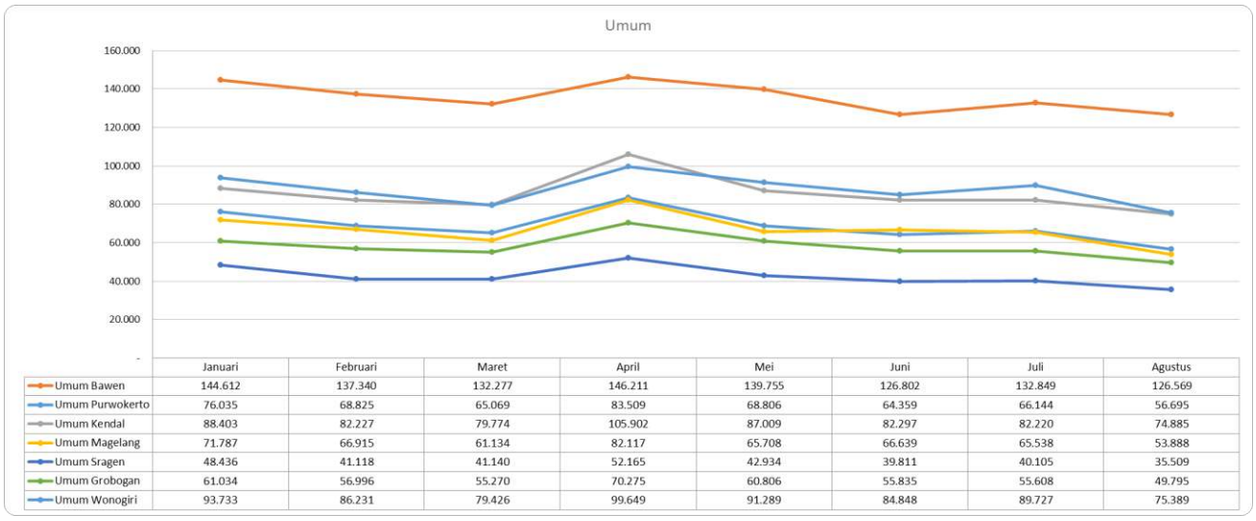

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Umum Bawen	144.612	137.340	132.277	146.211	139.755	126.802	132.849	126.569
Umum Purwokerto	76.035	68.825	65.069	83.509	68.806	64.359	66.144	56.695
Umum Kendal	88.403	82.227	79.774	105.902	87.009	82.297	82.220	74.885
Umum Magelang	71.787	66.915	61.134	82.117	65.708	66.639	65.538	53.888
Umum Sragen	48.436	41.118	41.140	52.165	42.934	39.811	40.105	35.509
Umum Grobogan	61.034	56.996	55.270	70.275	60.806	55.835	55.608	49.795
Umum Wonogiri	93.733	86.231	79.426	99.649	91.289	84.848	89.727	75.389

Sumber : Dinas Perhubungan 2025

Gambar II.7. Penumpang Kategori Umum Januari-Agustus 2025

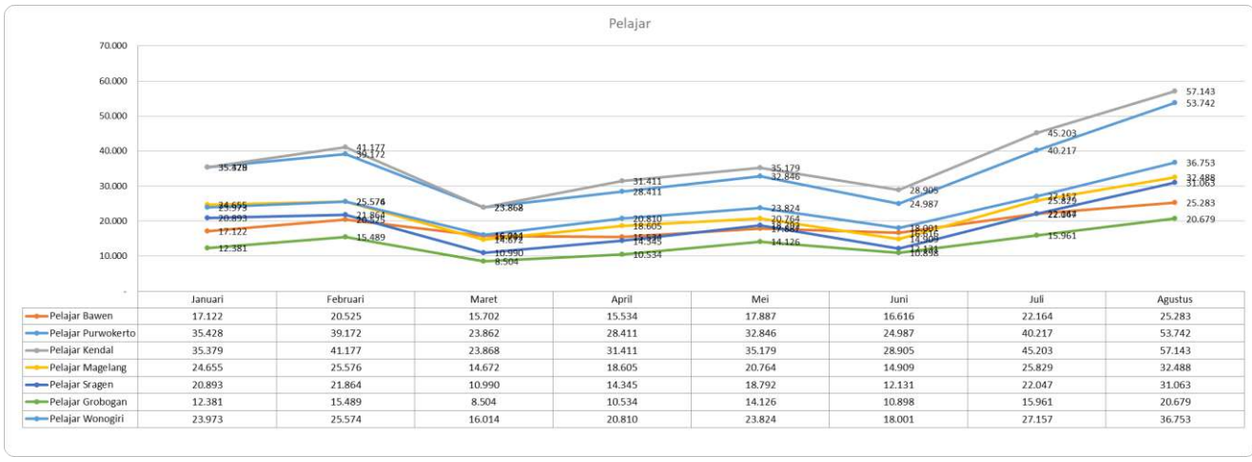

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pelajar Bawen	17.122	20.525	15.702	15.534	17.887	16.616	22.164	25.283
Pelajar Purwokerto	35.428	39.172	23.862	28.411	32.846	24.987	40.217	53.742
Pelajar Kendal	35.379	41.177	23.868	31.411	35.179	28.905	45.203	57.143
Pelajar Magelang	24.655	25.576	14.672	18.605	20.764	14.909	25.829	32.488
Pelajar Sragen	20.893	21.864	10.990	14.345	18.792	12.131	22.047	31.063
Pelajar Grobogan	12.381	15.489	8.504	10.534	14.126	10.898	15.961	20.679
Pelajar Wonogiri	23.973	25.574	16.014	20.810	23.824	18.001	27.157	36.753

Sumber : Dinas Perhubungan 2025

Gambar II.8. Penumpang Kategori Pelajar Januari-Agustus 2025

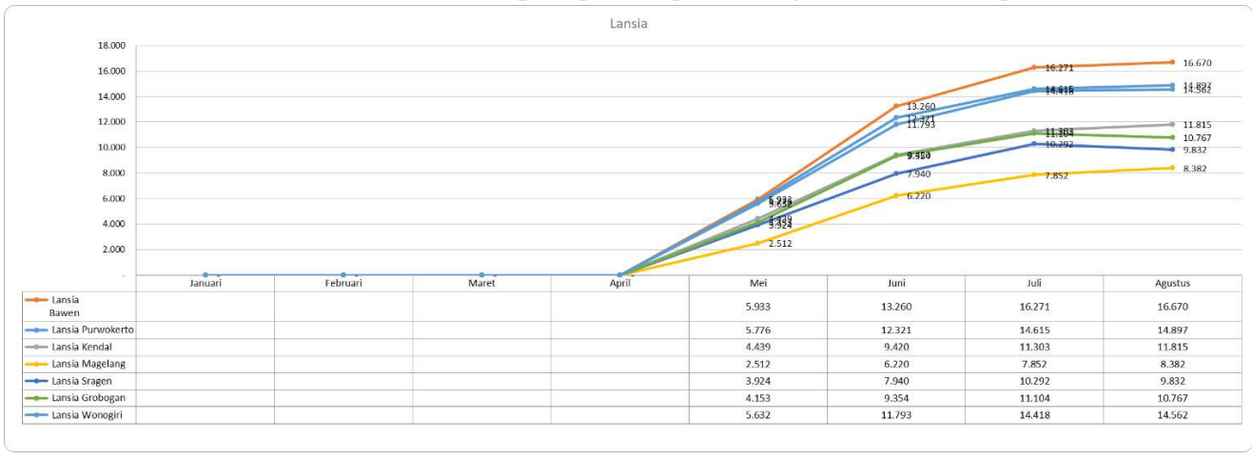

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Lansia Bawen					5.933	13.260	16.271	16.670
Lansia Purwokerto					5.776	12.321	14.615	14.897
Lansia Kendal					4.439	9.420	11.303	11.815
Lansia Magelang					2.512	6.220	7.852	8.382
Lansia Sragen					3.924	7.940	10.292	9.832
Lansia Grobogan					4.153	9.354	11.104	10.767
Lansia Wonogiri					5.632	11.793	14.418	14.562

Sumber : Dinas Perhubungan 2025

Gambar II.9. Penumpang Kategori Lansia Januari-Agustus 2025

Beralihnya masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum (mode shifting) dapat mengatasi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keselamatan dan menghemat biaya peningkatan kapasitas infrastruktur jalan. Manfaat layanan Trans Jateng yang dapat dikapitasikan dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dikeluarkan sebagai mana tabel berikut.:

Tabel II.14. Operasional dan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 dan 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1.	Total Biaya Operasional Trans Jateng				
	a. Biaya Operasional Kendaraan (BOK)	Rp.000,-	72.935.587	82.982.804	92.031.251
	b. Biaya Tenaga Kerja (Gaji Crew)	Rp.000,-	19.166.873	21.127.030	22.657.423
	c. Biaya Prasarana (Shelter, dll)	Rp.000,-	1.658.700	1.833.500	871.560
	d. Total Biaya (1a+1b+1c)	Rp.000,-	93.761.160	105.942.854	115.560.234
2.	Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng				
	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.000,-	22.405.562	27.454.138	32.472.937
	b. Estimasi Penghematan Biaya Perjalanan	Rp.000,-	36.763.473	45.880.510	50.177.948
	c. Estimasi Penghematan Subsidi BBM	Rp.000,-	12.825.370	14.861.343	22.890.512
	d. Total Nilai Manfaat (2a+2b+2c)	Rp.000,-	71.994.406	88.195.991	105.541.397
3.	Proporsi Anggaran & Manfaat (2d:1d)x100%	%	76,78	83,2	91,33

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Untuk mendukung konektivitas jaringan transportasi aglomerasi perkotaan, diperlukan perluasan cakupan layanan koridor Trans Jateng. Upaya ini dilakukan melalui penambahan koridor baru sekaligus peningkatan kualitas layanan pada koridor yang sudah ada. Salah satu faktor penting dalam memperluas jangkauan layanan adalah penyediaan halte yang representatif, aman, dan mudah diakses, sehingga memudahkan penumpang dalam melakukan perjalanan serta meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum. Antara Tahun 2018 – 2024 telah terbangun 353 halte di 7 koridor Trans Jateng. Berikut data terkait dengan jumlah halte Trans Jateng pada Tahun 2024 :

Tabel II.15. Jumlah Tempat Pemberhentian Bus (TPB) Pelayanan Trans Jateng Tahun 2024

Koridor Trans Jateng	Kebutuhan	Terbangun	Belum Terbangun*
Kota Semarang – Kabupaten Semarang (Bawen)	95	92	3
Kabupaten Banyumas (Purwokerto) - Purbalingga	64	62	2
Kota Semarang – Kendal (Weleri)	53	53	0
Kabupaten Magelang –Purworejo (Kutoarjo)	47	34	13
Surakarta – Sragen (Sumberlawang)	87	25	62
Kota Semarang – Grobogan (Gubug – Godong)	71	22	49
Surakarta – Sukoharjo –Wonogiri	122	52	70
Total	539	340	199

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Catatan : * Halte yang belum terbangun di beberapa tempat sudah dilengkapi rambu bus stop/MMT

Pemenuhan shelter direncanakan pada 3 (tiga) koridor yaitu Koridor Surakarta – Sragen (Sumberlawang); Koridor Kota Semarang – Grobogan (Gubug – Godong) dan Koridor Surakarta – Sukoharjo –Wonogiri dan rencana pembukaan koridor pada WP Gelangmanggung, Jekuti, Petanglong, Cibalingmas, Kedungsepur.

d. Angkutan pada Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Angkutan pada masa lebaran, natal dan tahun baru merupakan penyelenggaraan / pengelolaan angkutan (disemua moda transportasi) pada masa lalu lintas tinggi pada waktu tertentu (*peak season*). Penyelenggaran ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang bertujuan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, dan terkendali. Pada Tahun 2024 pengguna angkutan umum sebanyak 31.946.832 orang pada masa lebaran dan 21.015.051 orang pada masa nataru. Hal ini mengalami lonjakan pada tahun sebelumnya dikarenkan massif nya Pemerintah mengadakan mudik gratis setiap tahun, serta meingkatnya layanan angkutan umum.

Tabel II.16. Jumlah Penumpang (Orang) Pada Masa Angkutan Lebaran dan Nataru

No	Jumlah Penumpang	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Lebaran**	**16.329.328**	**NA**	**7.851.683**	**24.343.824**	**30.474.683**	**31.946.832**
a.	Angkutan Umum	8.179.814	NA	5.295.715	15.477.634	17.895.047	19.087.399
b.	Pribadi	8.149.514	NA	2.555.968	8.866.190	12.579.636	12.859.433
2.	**Nataru**	**11.482.975**	**NA**	**15.653.528**	**16.978.216**	**17.072.434**	**21.015.051**
a.	Angkutan Umum	3.660.441	NA	11.446.488	9.986.033	11.803.434	15.575.860
b.	Pribadi	7.822.534	NA	4.207.039	6.992.183	5.269.000	5.439.191
Total		**27.812.303**	**NA**	**23.505.211**	**41.322.039**	**47.547.137**	**52.961.883**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan dimasa lebaran, natal dan tahun baru lebih banyak yang menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Namun, hal ini masih tetap diperlukan peningkatan layanan angkutan umum untuk mengatasi permasalahan yang terkait kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

e. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP

1) Pelabuhan

Mendasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.432 Tahun 2017, terdapat 14 Pelabuhan di Jawa Tengah yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap dan Tegal), 8 Pelabuhan Pengumpan Regional dan 3

Pelabuhan Pengumpan Lokal. Adapun rincian dari pelabuhan dimaksud sebagaimana berikut :

Tabel II.17. Hirarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah

No.	Pelabuhan	Hierarki	Keterangan
1.	Tanjung Emas, Kota Semarang	Utama	
2.	Tanjung Intan, Kabupaten Cilacap	Pengumpul	
3.	Tegal, Kota Tegal	Pengumpul	
4.	Batang, Kabupaten Batang	Pengumpan Regional	• 2027 menjadi Pengumpul • Sebagian lahan reklamasi masih dalam proses di BPN
5.	Sluke, Kabupaten Rembang	Pengumpan Regional	• 2027 menjadi Pengumpul • Lahan masih terdapat sengketa dalam proses di Pengadilan
6.	Tasik Agung, Kabupaten Rembang	Pengumpan Regional	• Pada kolam pelabuhan terdapat karang hidup
7.	Jepara, Kabupaten Jepara	Pengumpan Regional	
8.	Karimunjawa, Kabupaten Jepara	Pengumpan Regional	
9.	Juwana, Kabupaten Pati	Pengumpan Regional	• Dermaga terletak di alur sungai (kondisi saat ini dilihat dari pelayanan sebagai pelabuhan perikanan) • Hasil studi FS/kelayakan Ta. 2022 pengembangan Pelabuhan Juwana yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan tidak memenuhi kelayakan sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional dan direkomendasikan untuk menjadi Pelabuhan Perikanan.
10.	Kendal, Kabupaten Kendal	Pengumpan Regional	• Terdapat tumpang tindih aset (terdapat layanan Pelabuhan penyeberangan dan Pelabuhan niaga) • Bagian dari Wilayah Kerja Tanjung Emas
11.	Legonbajak, Kabupaten Jepara	Pengumpan Regional	
12.	Brebes, Kabupaten Brebes	Pengumpan Lokal	• 2027 menjadi Pengumpan Regional
13.	Pekalongan	Pengumpan Lokal	• 2027 menjadi Pengumpan Regional
14.	Pemalang	Pengumpan Lokal	• 2027 menjadi Pengumpan Regional

Sumber :
- KP.432 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), 2017
- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pada Tahun 2020 Kementerian Perhubungan mulai melakukan reviu KP.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Sumber : http://gis.perhubungan.jatengprov.go.id/, 2024

Gambar II.10. Persebaran Pelabuhan Di Provinsi Jawa Tengah

Sedangkan mendasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, rencana hierarki pelabuhan sebagai berikut : Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang sebagai satu kesatuan sistem dengan Terminal Kendal), 4 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap, Tegal, Batang (KITB), Sluke), sisanya merupakan Pelabuhan Pengumpan Regional sejumlah 6 pelabuhan dan Pelabuhan Pengumpan Lokal sejumlah 10 pelabuhan. Pelabuhan ini dimanfaatkan untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pelabuhan Pengumpan Regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, namun sampai dengan saat ini kewenangan dimaksud belum diserahkan secara P3D dari Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Perhubungan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Proses saat ini pada tahap persiapan proses P3D utamanya terkait dengan personil, pendanaan dan pemetaan aset. Namun sesuai dengan hasil konsultasi dengan BKN Proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional sudah kedaluarsa dengan demikian bisa dianggap sebagai pengalihan bias.

Dalam menukung kawasan industri terdapat rencana pengembangan/pembangunan pelabuhan kendal dan pelabuhan batang. Saat ini, Pelabuhan Kendal menghadapi beberapa kendala teknis yang perlu segera ditangani. Permasalahan utama yang dihadapi adalah pendangkalan kolam pelabuhan serta kebutuhan rehabilitasi breakwater

pada dermaga penyeberangan. Akibat kondisi tersebut, operasional kapal motor Kali Bodri yang sebelumnya aktif melayani penyeberangan di Pelabuhan Kendal sekarang berpindah layanan. Hal ini berdampak pada menurunnya fungsi pelabuhan sebagai simpul transportasi laut sekaligus pintu distribusi logistik di wilayah sekitarnya. Sementara itu, proses pengembangan Pelabuhan Batang masih terus berjalan. Berdasarkan laporan per Desember 2024, progres pembangunan telah mencapai 59,9%. Saat ini juga sedang berlangsung pembahasan perjanjian konsesi antara Pelindo dan UPP Kelas III Batang. Namun, pembahasan tersebut belum mencapai kesepakatan karena Pelindo mengusulkan masa konsesi selama 80 tahun dengan skema profit sharing 0%, yang dinilai belum seimbang bagi pemerintah. Dari sisi regulasi, izin pembangunan Pelabuhan Batang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 23 April 2024, dengan status sebagai pelabuhan pengumpan regional. Sesuai ketentuan, dalam jangka waktu enam bulan sejak diterbitkannya izin pembangunan, perjanjian konsesi wajib diselesaikan. Hingga saat ini, proses tersebut masih menjadi perhatian utama agar pembangunan pelabuhan dapat berjalan sesuai target waktu dan memberikan manfaat optimal bagi penguatan jaringan logistik Jawa Tengah. Pengembangan Pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Batang memiliki arti penting dalam mendukung Konektivitas sektor industri dan perdagangan di kawasan Pantura Jawa Tengah dengan penyelesaian permasalahan teknis di Pelabuhan Kendal dan percepatan pembangunan Pelabuhan Batang, diharapkan kedua pelabuhan tersebut dapat berfungsi optimal sebagai simpul distribusi logistik dan generator ekonomi regional, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan Jawa Tengah dalam periode perencanaan. Data Produksi Pelabuhan Di Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.18. Data Produksi Pelabuhan Di Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelabuhan	14	14	14	14	14
2	Pelabuhan Tanjung Emas					
	a. Kunjungan kapal (*call*)	3.193	3.281	4.027	4.391	3.827
	b. GRT (GT)	24.578.491	27.081.098	32.552.981	33.189.978	29.661.229
	c. Kargo (ton)	4.501.617	15.697.387	15.445.826	17.400.930	16.673.261
	d. Kontainer (*Teus*)	717.062	797.020	765.942	781.841	895.904
	e. Penumpang (orang)	158.581	174.974	341.244	398.001	378.547
	f. *Dweelling Time* TPKS Impor	3,84	3,93	3,65	3,27	4.43
	g. *Dweelling Time* TPKS Expor	2,78	3,52	3,05	2,92	4.02
3	Pelabuhan Tanjung Intan					
	a. Kunjungan kapal (*call*)	1.441	1.509	1.545	1.354	1.406
	b. GRT (GT)	29.555.795	31.064.395	37.960.543	31.229.248	33.026.874
	c. Kargo (ton)	8.533.608	8.455.772	7.813.447	7.205.115	7.513.386

Sumber : Diolah dari Perhubungan Dalam Angka, 2025

Selama tahun 2024, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai pelabuhan utama di Jawa Tengah mencatat rata-rata dwelling time impor sebesar 4,43 hari, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,27 hari. Untuk layanan ekspor, dwelling time juga mengalami kenaikan dari 2,92 hari pada tahun 2023 menjadi 4,02 hari pada tahun 2024. Peningkatan dwelling time ini menunjukkan masih adanya inefisiensi dalam proses bongkar muat dan arus logistik di pelabuhan. Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap daya saing, karena memperlambat perputaran barang, meningkatkan biaya logistik, serta mengurangi kecepatan distribusi ke daerah hinterland Jawa Tengah.

Apabila tidak segera diatasi, tingginya dwelling time berpotensi menghambat iklim investasi, memperbesar biaya produksi, dan mengurangi daya tarik Pelabuhan Tanjung Emas sebagai simpul utama perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa perbaikan manajemen kepelabuhanan, percepatan pelayanan kepabeanan, serta peningkatan koordinasi antar-instansi untuk menurunkan dwelling time agar sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

2) Perusahaan Angkutan Laut Dan Jasa Terkait Angkutan Di Perairan di Jawa Tengah

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta pelindungan lingkungan maritim. Dalam memperlancar proses kegiatan di bidang Pelayaran terdapat kegiatan usaha atau yang sering disebut usaha jasa terkait. Usaha Jasa Terkait diantaranya berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas. Di Jawa Tengah terdapat 669 Angkutan Laut Dan Jasa Terkait Angkutan Di Perairan di Jawa Tengah. Data sebagaimana tabel :

Tabel II.19. Rekapitulasi Data Perusahaan Tahun 2024

NO	KOTA/KAB	Bongkar Muat	Depo	EMKL	JPT	Tally	Penyewaan Peralatan Angkutan Laut	Pelra	TOTAL
1	Banyumas	0	0	0	1	0	0	0	1
2	Batang	5	0	0	2	0	2	0	9
3	Boyolali	0	0	0	2	0	0	0	2
4	Brebes	0	0	0	1	0	0	0	1
5	Cilacap	22	0	3	13	2	2	0	42
6	Demak	0	0	0	4	0	0	0	4
7	Jepara	9	0	0	1	1	1	7	19
8	Karanganyar	0	0	0	1	1	1	0	3
9	Kebumen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kendal	0	0	0	2	0	0	0	2
11	Klaten	0	0	0	2	0	0	0	2
12	Kudus	1	0	0	1	1	0	0	3
13	Pati	0	0	0	0	0	0	2	2
14	Pekalongan	0	0	0	0	1	0	0	1
15	Pemalang	0	0	0	0	0	3	0	3
16	Purbalingga	0	0	0	1	0	0	0	1

NO	KOTA/KAB	Bongkar Muat	Depo	EMKL	JPT	Tally	Penyewaan Peralatan Angkutan Laut	Pelra	TOTAL
17	Rembang	12	0	0	0	0	0	1	13
18	Semarang	27	9	10	443	4	4	41	538
19	Sragen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Sukoharjo	0	0	0	5	2	1	0	8
21	Surakarta	0	0	0	4	0	0	0	4
22	Tegal	0	0	0	1	2	0	2	5
23	Temanggung	0	0	0	2	0	0	0	2
24	Wonogiri	0	0	0	1	2	0	0	3
25	Wonosobo	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL		76	9	13	488	16	14	53	**669**

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

3) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sejak Tahun 2020 sudah tidak lagi mengoperasionalkan KMC Kartini dikarenakan secara teknis sudah tidak layak untuk dioperasionalkan serta pada saat ini penyeberangan dari dan ke Karimunjawa sudah terdapat layanan penyeberangan. Sampai dengan tahun 2024 proses hibah KMC Kartini telah diupayakan, update terkahir terkait dengan updaya tersebut yaitu dengan adanya surat Kadishub Prov Jabar No 5480/Ku.03.11.02/Sekre Tanggal 16 Agustus 2024 Hal Permohonan hibah KMC Kartini 1. Rencana terkait hibah tersebut KMC Kartini 1 akan dimanfaatkan untuk menunjang pariwisata di daerah Pangandaran. Selain itu telah dilakukan tinjauan lapangan oleh BPKAD Prov Jabar dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 November 2024.

Tabel II.20. Gambaran Pelayanan Dari dan Ke Karimunjawa Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai*) (Jepara-Karimunjawa)	30.924	29.890	43.755	50.943	62.402
2	Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspress 1 (Jepara –Karimunjawa) (orang)	27.162	45.410	107.447	153.348	168.571
3	Jumlah penumpang KM Kelimutu (Semarang-Karimunjawa)	891	405	4.999	895	3.255
4	Jumlah penumpang KM Lawit (Semarang-Karimunjawa)	667	834	4.052	1.877	N/A
Jumlah Penumpang Terangkut		200.192	59.644	76.539	160.253	234.228

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Mendasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07 Tahun 2021 Tentang Penetapan Trayek Pelayanan Angkutan Dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 lintas penyeberangan sungai antar kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.21. Daftar Lintas Penyeberangan Sungai Kewenangan Provinsi

No	Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Sisi Dermaga	Fasilitas Penyeberangan			Dokumen Kapal	
			Dermaga	Lampu Penerangan High Mast (Alur)	Lampu Penerangan (Dermaga)	Pas Sungai	Surat Keterangan Ukur
1.	Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Lutungmati (Batang)	Permanen (2023)	-	3 Unit (2023)	2024	2024
		Desa Tegalsari (Kendal)	Permanen (2023)	-	3 Unit (2023)	2024	2024
2.	Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Yosorejo (Batang)	Non Permanen	-	3 Unit (2022)	-	-
		Desa Jatipurwo (Kendal)	Permanen (2023)	1 Unit (2023)	6 Unit (2022)	2024	2024
3.	Sungai Pemali Kab. Brebes – Kab. Tegal	Desa Tegalwangi (Brebes)	Non Permanen	1 Unit (2022)	3 Unit (2022)	-	-
		Desa Bojong Prupuk Utara (Kab. Tegal)	Non Permanen	-	4 Unit (2022)	-	-
4.	Sungai Gangsa Kab. Brebes – Kota Tegal	Desa Randusanga Wetan (Brebes)	Non Permanen	-	5 Unit (2019)	2024	2024
		Desa Kajongan (Kota Tegal)	Non Permanen	-	1 Unit (APBD Tegal)	2024	2024
5.	Sungai Bengawan Solo Surakarta – Sukoharjo	Desa Sangkrah (Kota Surakarta)	Non Permanen	-	Belum Ada	-	-
		Desa Gading (Sukoharjo)	Non Permanen	-	Belum Ada	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Fasilitas pelabuhan sungai utamanya dermaga sungai rencana akan dibangun pada periode 2025-2030 Desa Kajongan (Kota Tegal), Desa Randusanga Wetan (Brebes), Desa Gading (Sukoharjo), Desa Sangkrah (Kota Surakarta).

Selain itu mendasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.432 Tahun 2017 juga terdapat 26 dermaga penyeberangan di Jawa Tengah yaitu : Pelabuhan Kendal, Pelabuhan Jepara, Pelabuhan Karimunjawa, (Cilacap di Sleko, Prenca, Alas Malang, Motehan, Sodong, Wijayapura, Lomanis, Cigintung, Perkuyan, Kutawaru, Klaces, Patimuan, Karanganyar), Waduk Gajah Mungkur di Dermaga wisata Waduk GM, Waduk Sempor, Waduk Mrica, Waduk Penjalin, Waduk Malahayu, (Wadaslintang di Dermaga Tritis, Kumijing, Plunjaran, Kalibening TPI2, TPI 4, Sumberejo, Prasasti (Kebumen), Erorejo), (Kedung Ombo di Kedunguter Sragen, Kemukus Sragen, WKO Boyolayar Sragen, Embun Bening Kec.Geyer Kab. Grobogan, Wana Wisata desa Blawong Kemusu Boyolali)

Mendasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07 Tahun 2021 Tentang Penetapan Trayek Pelayanan Angkutan Dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 lintas penyeberangan sungai antar kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Ketersediaan faslitas keselamatan untuk penyeberangan yang menjadi kewenangan provinsi sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.22. Fasilitas Keselamatan Penyeberangan Sungai Kewenangan Provinsi Tahun 2024

No	Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Sisi Dermaga	Fasilitas Keselamtan Penyeberangan Sungai		
			Life Jacket	Rambu Keselamatan	Papan Sop Penyeberangan
1.	Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Lutungmati (Batang)	12	1	1
		Desa Tegalsari (Kendal)	12	1	1
2.	Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Yosorejo (Batang)	1	-	-
		Desa Jatipurwo (Kendal)	2	-	-
3.	Sungai Pemali Kab. Brebes – Kab. Tegal	Desa Tegalwangi (Brebes)	-	-	-
		Desa Bojong Prupuk Utara (Kab. Tegal)	-	-	-
4.	Sungai Gangsa Kab. Brebes – Kota Tegal	Desa Randusanga Wetan (Brebes)	5	-	-
		Desa Kajongan (Kota Tegal)	5	-	-
5.	Sungai Bengawan Solo Surakarta – Sukoharjo	Desa Sangkrah (Kota Surakarta)	-	-	-
		Desa Gading (Sukoharjo)	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

f. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Perhubungan Udara

Jumlah Bandara di Provinsi Jawa Tengah ada 6 (enam) Bandara yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang di Kota Semarang, Bandara Internasional Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali, Bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap, Bandara Dewadaru Karimunjawa di Kabupaten Jepara, Bandara Ngloram di Kabupaten Blora dan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga.

1) Bandara Ahmad Yani Semarang di Kota Semarang

a) Klasifikasi Bandara : Bandar Kelas 4C
b) *Runway* (54 F/D/X/T) : 2560 m x 45 m (120.600 m^2)
c) *Taxiway* (51 R/D/X/T) : 140 m x 15 m (2.100 m^2)
d) *Apron* (27 F/D/X/T) : 296.24 m x 98 m (29.031.52 m^2)
e) Pesawat Terbesar : 5 PESAWAT JENIS B-737 / F-100; 2 PESAWAT JENIS CN-235, 2 HELICOPTER
f) Fasilitas Sisi Darat :
Terminal : 5.546 m^2
Kargo : 99 m^2

Bandara Internasional Ahmad Yani merupakan bandar udara yang terletak di Kota Semarang. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2024 tanggal 2 April 2024, status Bandara Ahmad Yani diturunkan dari bandara internasional menjadi bandara domestik.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya untuk mengembalikan status internasional bandara tersebut. Hasilnya, pada tanggal 22 April 2025, diterbitkan surat dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Nomor HK/302/1/3/DRJU.KUM-2025, tentang Tindak Lanjut Penetapan Status Bandara Jenderal Ahmad Yani sebagai Bandar Udara Internasional. Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 25 April 2025, terbit Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandara S.M. Badaruddin II di Palembang, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin di Bangka Belitung, dan Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang sebagai bandara internasional.

Saat ini, status Bandara Ahmad Yani telah resmi kembali menjadi Bandara Internasional setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional. Rute pergerakan penerbangan Bandara Ahmad Yani Semarang Semarang saat ini diantaranya dari dan ke Bandara Internasional Soekarno–Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta; Bandara internasional Syamsudin Noor Banjarmasin; Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Kalimantan Timur; Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar; Bandara Iskandar Pangkal Bun; Bandara Internasional Hang Nadim Batam; Bandara Rahadi Osman Ketapang; dan Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar, serta pada direncanakan pada Bulan September terdapat penerbangan internasional Semarang – Kualalumpur.

Data pergerakan pesawat Bandara Ahmad Yani Semarang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.23. Data Pergerakan Pesawat Bandara Ahmad Yani Semarang Tahun 2020-2024

Pergerakan Pesawat	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	16.692	10.134	14.473	17.657	17.703
- Datang	8.345	5.030	7.313	8.585	8.696
- Berangkat	8.347	5.104	7.090	9.072	9.007
Internasional	413	99	368	576	372
- Datang	206	84	298	532	342
- Berangkat	207	15	70	44	30
Total	17.105	10.233	14.740	18.233	18.075

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura Indonesia, 2025

Pergerakan Pesawat pada Bandara Ahmad Yani Semarang penerbangan Internasional pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 hal ini disebabkan karena status Bandara Ahmad Yani hanya melayani penerbangan kargo internasional sehingga jumlah

penerbangan internasional mengalami penurunan.. Adapun data produksi penumpang dan kargo bandara dari Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

Tabel II.24. Data Produksi Penumpang Bandara Ahmad Yani Semarang Tahun 2020-2024

Penumpang	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	1.343.435	884.970	1.631.408	2.091.083	2.281.301
- Datang	675.907	440.626	817.293	1.048.649	1.140.327
- Berangkat	656.930	435.461	800.816	1.042.434	1.139.435
Internasional	40.602	9	77	4.867	145
- Datang	22.120	3	5	2.262	51
- Berangkat	20.482	6	72	2.605	94
Transit	10.598	8.883	13.299	9.753	1.539
Total	1.384.037	884.979	1.631.485	2.095.950	2.281.446

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura Indonesia, 2025

Tabel II.25. Data Produksi Kargo (Kilogram) Bandara Ahmad Yani Semarang Tahun 2020-2024

Angkutan Barang	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	9.027.003	6.763.331	6.222.664	9.797.909	15.351.204
- Bongkar	3.596.405	2.979.118	1.378.827	1.247.101	1.527.315
- Muat	5.430.598	3.784.213	4.843.837	8.550.808	13.823.889
Internasional	368.737	1.212.031	3.578.079	4340839	3.481.791
- Bongkar	225.787	1.199.425	3.515.300	4.336.202	3.481.791
- Muat	142.950	12.606	62.779	4.637	0
Total	9.395.740	7.975.362	9.800.743	14.138.748	18.832.995

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura Indonesia, 2025

2) Bandara Internasional Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali

a) Klasifikasi Bandara : Bandar Kelas III
b) *Runway* (54 F/D/X/T) : 2500 m x 45 m (117.000 m^2)
c) *Taxiway* (51 R/D/X/T) : 240 m x 23 m (5.520 m^2)
d) *Apron* (27 F/D/X/T) : 102.5 m x 90 m (9.225 m^2)
e) Pesawat Terbesar : -
f) Fasilitas Sisi Darat :
Terminal : 9.483 m^2
Kargo : 883 m^2

Rute pergerakan penerbangan Bandara Adi Soemarmo saat ini diantaranya dari dan ke Bandara Internasional Soekarno–Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta; Bandara Internasional Supadio Pontianak ; dan Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar.

Data pergerakan pesawat Bandara Adi Sumarmo Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.26. Data Pergerakan Pesawat Bandara Internasional Adi Sumarmo Tahun 2020-2024

Pergerakan Pesawat	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	9.263	4.058	6.519	8.405	8.291
- Datang	4.631	2.029	3.260	4.203	4.146
- Berangkat	4.632	2.029	3.259	4.202	4.145
Internasional	86	9	217	444	495
- Datang	42	4	109	220	248
- Berangkat	44	5	108	224	247
Total	9.349	4.067	6.736	8.849	8.786

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura Indonesia, 2025

Pergerakan Pesawatdi Bandara Adi Suemarmo pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan pada setiap tahun. Adapun saat ini Bandara Adi Soemarmo tidak melayani penerbangan Internasional, penerbangan Internasional hanya melayani untuk carter umroh yang saat ini sudah berjalan yaitu penerbangan umroh setiap seminggu 2 (dua) kali menggunakan maskapai Citylink. Mendasarkan SK Menhub No. KM. 31 / 2024 tanggal 2 April 2024, status Bandara Adi Soemarmo diturunkan dari Bandara Internasional menjadi Bandara domestik, pada saat ini status Bandara Adi Soemarmo telah menjadi Bandar Udara Internasional setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan no 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional.

Adapun data produksi penumpang dan kargo bandara dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.27. Data Produksi Penumpang Bandara Internasional Adi Sumarmo Tahun 2020-2024

Penumpang	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	543.168	427.356	839.773	1.154.585	1.091.115
- Datang	269.181	216.766	412.468	567.171	542.588
- Berangkat	272.697	210.590	427.305	587.414	548.527
Internasional	17.198	15	33.739	84.698	98.673
- Datang	9.230	4	16.835	42.093	49.778
- Berangkat	7.968	11	16.904	42.605	48.895
Transit	1.290	0	0	0	0
Total	560.366	427.371	873.512	1.239.283	1.189.788

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura Indonesia, 2025

Tabel II.28. Data Produksi Kargo (Kilogram) Bandara Internasional Adi Sumarmo Tahun 2020-2024

Angkutan Barang	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik	2.339.039	1.856.723	1.760.287	3.047.697	4.360.918
- Bongkar	1.153.294	361.954	300.891	322.057	319.463
- Muat	1.185.745	1.494.769	1.459.396	2.725.640	4.041.455
Internasional	0	15.158	0	2.180	12.915
- Bongkar	0	15.158	0	1.780	9.922
- Muat	9	0	0	400	2.993
Total	2.339.039	1.871.881	1.760.287	3.047.877	4.373.833

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura Indonesia, 2025

3) Bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap

a) Klasifikasi Bandara : Bandar Kelas III
b) *Runway* (54 F/D/X/T) : 1.400 m x 30 m (42.000 m^2)
c) *Taxiway* (51 R/D/X/T) : 105 m x 18 m (1.890 m^2)
d) *Apron* (27 F/D/X/T) : 190 m x 94 m (17.974 m^2)
e) Pesawat Terbesar : ATR 72-500
f) Fasilitas Sisi Darat :
Terminal : 777 m^2
Kargo : -

Data pergerakan pesawat Bandara Tunggul Wulung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang terdiri dari pesawat niaga dan bukan niaga (pesawat latih) sebagai berikut :

Tabel II.29. Data Pergerakan Pesawat Bandara Tunggul Wulung Tahun 2020-2024

Pergerakan Pesawat	2020	2021	2022	2023	2024
Datang	3.963	3.223	3.351	2.444	2.213
Berangkat	3.964	3.223	3.352	2.444	2.214
Total	7.926	6.446	6.703	4.888	4.427

Sumber : UPBU Tunggul Wulung, 2025

Bandara Tunggul Wulung hanya melayani penerbangan carter adapun data produksi penumpang dan kargo bandara dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 202 sebagai berikut :

Tabel II.30. Data Produksi Penumpang Bandara Tunggul Wulung Tahun 2020-2024

Penumpang	2020	2021	2022	2023	2024
Datang	627	355	139	156	209
Berangkat	795	337	173	170	173
Total	1.422	692	312	326	382

Sumber : UPBU Tunggul Wulung, 2025

Tabel II.31. Data Produksi Bagasi dan Kargo (Kilogram) Bandara Tunggul Wulung Tahun 2020-2024

ANGKUTAN BARANG	2020	2021	2022	2023	2024
BONGKAR	3.883	52	18	35	90
MUAT	4.677	514	144	110	198
JUMLAH	8.660	566	162	145	288

Sumber : UPBU Tunggul Wulung, 2025

4) Bandara Dewadaru Karimunjawa di Kabupaten Jepara

a) Klasifikasi Bandara : Bandar Kelas III
b) *Runway* (54 F/D/X/T) : 1.400 m x 30 m (42.000 m^2)
c) *Taxiway* (51 R/D/X/T) : 62 m x 15 m (930 m^2)
d) *Apron* (27 F/D/X/T) : 91 m x 50 m (4.550 m^2)

e) Pesawat Terbesar : ATR 72-600 atau yg sejenis
f) Fasilitas Sisi Darat :
Terminal : 220 m^2
Kargo : -

Kegiatan pengembangan yang dilakukan pada tahun Tahun 2019 perpanjangan *Runway* dari 1.200 m x 30 m menjadi 1.400 m x 30 m, pengembangan terminal penumpang dari 120 m^2 menjadi 220 m^2 dan Tahun 2020 pekerjaan pagar pengaman bandara serta pekerjaan talud bandara . Panjang *Runway* dimaksud hanya bisa melayani 69,44 % (50 orang dari total kapasitas sebesar 72 orang) pada saat *Take Off*. Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membebaskan lahan ± 16.010 m^2 untuk Perpanjangan *Runway* menjadi 1.600 m x 30 m. Pada Tahun 2022 terdapat perluasan gedung terminal penumpang dengan luas bangunan lantai 1 seluas 980 m^2 dan lantai 2 seluas 880 m^2

Data pergerakan pesawat Bandara Dewadaru Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.32. Data Pergerakan Pesawat Bandara Dewadaru Tahun 2020 - 2024

Pergerakan Pesawat	2020	2021	2022	2023	2024
Datang	31	4	65	118	101
Berangkat	31	4	65	116	101
Total	62	8	130	234	202

Sumber : UPBU Dewadaru, 2025

Pada tahun 2020-2022 terdapat penurunan pergerakan pesawat hal ini karena adanya pandemi Covid-19 pada triwulan 1 tahun 2020 dan setelah itu bandara Dewadaru masih belum melayani penerbangan reguler (bandara hanya melayanani penerbangan emergency/untuk kasus penerbangan darurat) selain itu juga terdapat pengembangan bandara.

Bandara Dewadaru hanya melayani penerbangan domestik. adapun data produksi penumpang bandara dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.33.
Data Produksi Penumpang Bandara Dewadaru Tahun 2020-2024

Penumpang	2020	2021	2022	2023	2024
Datang	900	20	422	753	706
Berangkat	962	27	423	774	737
Total	1.862	47	845	1527	1443

Sumber : UPBU Dewadaru, 2025

5) Bandara Ngloram di Kabupaten Blora

a) Klasifikasi Bandara : -
b) *Runway* (54 F/D/X/T) : 1.600 m x 30 m (48.000 m^2)
c) *Taxiway* (51 R/D/X/T) : 141,5 m x 23 m (3.254,5 m^2)
d) *Apron* (27 F/D/X/T) : 90 m x 60 m (5.400 m^2)
e) Pesawat Terbesar : ATR 72-600 atau yg sejenis
f) Fasilitas Sisi Darat :
Terminal : -
Kargo : -

Kegiatan pengembangan yang dilakukan pada tahun 2019 perpanjangan *Runway* dari 800 m x 30 m menjadi 1.200 m x 30 m, pagar keliling dan saluran sedangkan Tahun 2020 pekerjaan perpanjangan Runway dari 1.200 m x 30 m menjadi 1.600 m x 30 m, Pembuatan Tuning *Area* dan Rekonstruksi *Apron*. Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membebaskan lahan ± 30.792 m^2 untuk jalan akses ke bandara, jalan akses kendaraan PK-PPK, Gedung PK-PPK dan Gedung operasional. Pada Tahun 2022 Bandara Ngloram kembali diperluas memalui pengadaan lahan yang digunakan untuk keselamatan penerbangan.

Bandara Ngloram di Kabupaten Blora operasional Bulan November 2021 dan di resmikan pada tanggal 17 Desember 2021 namun operasional Bandara Ngloram berhenti beroperasi sementara waktu sejak Maret 2022 dikarenakan ada renovasi Bandara halim Perdana Kusuma yang merupakan rute penerbangan dari Blora ke Jakarta namun pada agustus 2022 penerbangan dibuka kembali dengan Rute Pondok cabe – Purbalingga dengan maskapi Wings Air. Selain itu dengan selesainya revitalisasi bandara Halim Bandara halim Perdana Kusuma, penerbangan Bandara halim Perdana Kusuma – Bandara Ngloram dibuka kembali Pada 27 Januari 2023 dengan jadwal penerbangan setiap rabu dan Jumat. Adapun data produksi pesawat dan penumpang Bandara Ngloram dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.34. Data Pergerakan Pesawat Bandara Ngloram Tahun 2021-2024

Pergerakan Pesawat	2021	2022	2023	2024
Datang	10	8	39	20
Berangkat	10	8	39	18
Total	20	16	78	38

Sumber : UPBU Dewadaru, 2025

Tabel II.35. Data Produksi Penumpang Bandara Ngloram Tahun 2021-2024

Penumpang	2021	2022	2023	2024
Datang	448	204	834	89
Berangkat	483	234	963	86
Total	931	438	1797	175

Sumber : UPBU Dewadaru, 2025

6) Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga

a) Klasifikasi Bandara : -
b) *Runway* (54 F/D/X/T) : 1.600 m x 30 m (48.000 m^2)
c) Taxiway (51 R/D/X/T) :
d) Komersiil : 160 m x 15 m (2.400 m^2)
TNI AU : 150 m x 15 m (2.250 m^2)
e) Apron (27 F/D/X/T) :
f) Komersiil : 103 m x 67 m (6.901 m^2)
TNI AU : 79 m x 82 m (6.478 m^2)
g) Pesawat Terbesar : ATR 72-600 atau yg sejenis, Boeng 737-200
h) Fasilitas Sisi Darat :
Terminal : -
Kargo : -

Kegiatan pengembangan yang dilakukan pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membebaskan lahan ± 30.023 m^2 untuk operasional Tahap I panjang *Runway* 1.600 m. sedangkan Pada Tahun 2020 progres pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman Runway 1.600 m x 30 m dan pembangunan *Apron* dan *Taxiway*. Pada Tahun 2021 dilakukan pengembangan sisi udara, parkir terminal dan jalan.

Bandara Jenderal Besar Soedirman diresmikan pada tanggal 11 Juni 2021 namun sudah operasional sejak 3 Juni 2021 dengan Citilink menjadi maskapai pertama yang melakukan penerbangan komersial di bandara tersebut. Rute yang dilayani mencakup Surabaya-Purbalingga dan Purbalingga-Jakarta (via Bandara Halim Perdanakusuma) dengan frekuensi dua kali dalam seminggu, yakni pada hari Kamis dan Sabtu menggunakan ATR 72-600. Namun operasional Jenderal Besar Soedirman berhenti beroperasi sementara waktu sejak Desember 2021 dikarenakan ada renovasi Bandara halim Perdana Kusuma yang merupakan rute penerbangan dari dan ke Jakarta. Pada agustus 2022 penerbangan dibuka kembali dengan Rute Pondok cabe – Purbalingga dengan maskapi Wings Air. Selain itu dengan selesainya revitalisasi bandara Halim Bandara halim Perdana Kusuma, penerbangan Bandara halim Perdana Kusuma – Bandara Ngloram dibuka kembali Pada 10 November 2022 dengan jadwal penerbangan setiap selasa dan kamis. Adapun data produksi pesawat dan penumpang Bandara Jenderal

Besar Soedirman dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.36. Data Pergerakan Pesawat Jenderal Besar Soedirman Tahun 2022-2024

PERGERAKAN PESAWAT	2022	2023	2024
Datang	18	16	12
Berangkat	18	16	12
JUMLAH	**36**	**32**	**24**

Sumber : Angkasa Pura Indonesia, 2025

Tabel II.37. Data Produksi Penumpang Bandara Jenderal Besar Soedirman Tahun 2022-2024

PENUMPANG	2022	2023	2024
Datang	736	117	51
Berangkat	783	152	50
JUMLAH	**1.519**	**269**	**101**

Sumber : Angkasa Pura Indonesia, 2025

g. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Perkeretaapian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mempunyai / menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

Panjang jalur Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sepanjang 1.680,26 Km / Sp, terdiri dari 929,498 Km / Sp jalur aktif dan 750,757 Km / Sp jalur non aktif. Dari 929,498 Km / Sp jalur aktif 292,44 Km / Sp merupakan jalur tunggal dan 637,06 Km / Sp jalur ganda. Adapun rincian panjang jalur Kereta Api sebagai berikut :

Tabel II.38. Rincian Panjang Jalur Kereta Api Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Km/Sp)

No.	Uraian	Panjang
I.	AKTIF	929,498
I.A.	GANDA	637,058
I.A.1.	DAOP III CIREBON	72,14
I.A.1.a.	Batas Jabar (Cirebon) - Batas daop III IV (Brebes)	36,91
I.A.1.b.	Perbatasan Jabar (Cirebon) - Ketanggungan - Perbatasan DAOP III V	35,23
I.A.2.	DAOP IV SEMARANG	292,59
I.A.2.a.	Batas daop III IV (Brebes) - Semarang Tawang	152,489
I.A.2.b.	Semarang Tawang - Gambringan	60,309
I.A.2.c.	Gambringan - Perbatasan Jatim (Bojonegoro)	79,792
I.A.3.	DAOP V PURWOKERTO	167,316
I.A.3.a.	Perbatasan DAOP III V (Brebes) - Prupuk - Kroya	89,292
I.A.3.b.	Kroya - Kutoarjo - Batas Daop V VI (Purworejo)	78,024
I.A.4.	DAOP VI YOGYAKARTA	105,012
I.A.4.a.	Solo Balapan - Klaten - Brambanan	43,256
I.A.4.b.	Solo Balapan - Kedungbanteng - Perbatasan Jatim (Ngawi)	41,72
I.A.4.c.	Batas Daop V VI (Purworejo) - Wojo	20,036
I.B.	TUNGGAL	292,44
I.B.1.	DAOP IV SEMARANG	65,032

No.	Uraian	Panjang
I.B.1.a.	Gundih - Gambringan	9,915
I.B.1.b.	Brumbung - Gundih - Batas daop IV VI (Grobogan)	55,117
I.B.2.	DAOP V PURWOKERTO	89,774
I.B.2.a.	Batas daop IV VI (Grobogan) - Solo Balapan	39,614
I.B.2.b.	Solo Balapan - Kadipiro - Bandara Adi Sumarmo	13,5
I.B.2.c.	Purwosari - Solo Kota - Sukoharjo – Wonogiri	36,66
I.B.3.	DAOP VI YOGYAKARTA	137,634
I.B.3.a.	Tegal - Slawi - Prupuk	38,5
I.B.3.b.	Perbatasan Jabar (Banjar) - Kroya	75,344
I.B.3.c.	Maos - Cilacap	20,755
I.B.3.d.	Gumilir - Karangtalun	3,035
II.	NON AKTIF	750,757
II.A.	DAOP IV SEMARANG	475,773
II.A.1.	Pekalongan – Wonopringgo	6,52
II.A.2.	Weleri – Besokor	3,7
II.A.3.	Kaliwungu - Kendal – Kalibodri	17,64
II.A.4.	Semarang Tawang - Semarang-Gudang	1,32
II.A.5.	Kedungjati - Tuntang – Ambarawa	36,76
II.A.6.	Ambarawa - Bedono - Batas DAOP	13,14
II.A.7.	Semarang - Demak - Kudus - Juana -Rembang-Jatirogo (Perbatasan Jawa Timur)	150,31
II.A.8.	Kudus - Mayong – Pecangaan	23,7
II.A.9.	Mayong – Welahan	5,9
II.A.10.	Juana – Tayu	24,56
II.A.11.	Rembang - Blora – Cepu	71,99
II.A.12.	Demak – Purwodadi – Blora	104,2
II.A.13.	Purwodadi – Ngrombo	7,733
II.A.14.	Wirosari – Kradenan	8,3
II.B.	DAOP V PURWOKERTO	142,16
II.B.1.	Maos - Purwokerto Timur	28,99
II.B.2.	Purwokwerto - Purwokerto Timur – Wonosobo	92,98
II.B.3.	Banjarsari – Purbalingga	6,52
II.B.4.	Cilacap – Pelabuhan Cilacap	1,98
II.B.5.	Kutoarjo – Purworejo	11,69
II.C.	DAOP VI YOGYAKARTA	132,82
II.C.1.	Magelang - Secang – Ambarawa	62,88
II.C.2.	Secang - Temanggung – Parakan	27,19
II.C.3.	Purwosari – Kartasura – Boyolali	23,02
II.C.4.	Wonogiri – Baturetno	19,73
	TOTAL	1.680,26

Sumber : BTP Jawa Bagian Tengah, 2024

Jumlah stasiun di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 115 stasiun, pada DAOP IV Semarang sebanyak 43 stasiun, DAOP V Purwokerto sebanyak 40 stasiun dan DAOP VI Yogyakarta sebanyak 27 stasiun dan DAOP III sebanyak 5 Stasiun. Adapun rincian dan kode stasiun untuk masing-masing DAOP sebagai berikut :

Tabel II.39. Rincian dan Kode Stasiun Pada Masing-Masing DAOP di Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Stasiun	Kode	Kelas	Jenis	No	Nama Stasiun	Kode	Kelas	Jenis
DAOP 3					10	Sidareja	SDR	Kelas 1	Penumpang
1	Brebes	BB	Kelas 1	Penumpang	11	Slawi	SLW	Kelas 2	Penumpang
2	Ketanggungan	KGG	Kelas 2	Penumpang	12	Prupuk	PPK	Kelas 2	Penumpang
3	Tanjung	TGN	Kelas 3	Penumpang	13	Bumiayu	BMA	Kelas 2	Penumpang
4	Larangan (Ke Pwt)	LRA	Kelas 3	Operasi	14	Gandrungmangun	GDM	Kelas 2	Penumpang
5	Songgom	SGG	Kelas 3	Operasi	15	Linggapura	LG	Kelas 3	Operasi
DAOP 4					16	Kretek	KRT	Kelas 3	Operasi
1	Tegal	TG	Besar A	Penumpang	17	Patuguran	PAT	Kelas 3	Operasi
2	Semarang Poncol	SMC	Besar A	Penumpang	18	Karangsari	KRR	Kelas 3	Operasi
3	Semarang Tawang	SMT	Besar A	Penumpang	19	Karanggandul	KGD	Kelas 3	Operasi
4	Pekalongan	PK	Besar C	Penumpang	20	Notog	NTG	Kelas 3	Operasi
5	Cepu	CU	Besar C	Penumpang	21	Kebasen	KBS	Kelas 3	Operasi
6	Pemalang	PML	Kelas 1	Penumpang	22	Randegan	RDN	Kelas 3	Operasi
7	Weleri	WLR	Kelas 1	Penumpang	23	Kemranjen	KJ	Kelas 3	Operasi
8	Ngrombo	NBO	Kelas 1	Penumpang	24	Sumpiuh	SPH	Kelas 3	Penumpang
9	Gundih	GD	Kelas 1	Penumpang	25	Tambak	TBK	Kelas 3	Operasi
10	Brumbung	BBG	Kelas 1	Penumpang	26	Ijo	IJ	Kelas 3	Operasi
11	Comal	CO	Kelas 2	Operasi	27	Sruweng	SRW	Kelas 3	Operasi
12	Sragi	SRI	Kelas 2	Operasi	28	Wonosari	WNS	Kelas 3	Operasi
13	Batang	BTG	Kelas 2	Operasi	29	Kutowinangun	KWN	Kelas 3	Penumpang
14	Ujungnegoro	UJN	Kelas 2	Operasi	30	Prembun	PRB	Kelas 3	Operasi
15	Krengseng	KNS	Kelas 2	Operasi	31	Butuh	BTH	Kelas 3	Operasi
16	Kalibodri	KBD	Kelas 2	Operasi	32	Sikampuh	SKP	Kelas 3	Operasi
17	Kaliwungu	KLN	Kelas 2	Operasi	33	Lebeng	LBG	Kelas 3	Operasi
18	Mangkang	MKG	Kelas 2	Operasi	34	Jeruklegi	JRL	Kelas 3	Operasi
19	Jerakah	JRK	Kelas 2	Operasi	35	Kawunganten	KWG	Kelas 3	Operasi
20	Alastua	ATA	Kelas 2	Operasi	36	Cipari	CPI	Kelas 3	Operasi
21	Gambringan	GBN	Kelas 2	Penumpang	37	Meluwung	MLW	Kelas 3	Operasi
22	Kradenan	KNN	Kelas 2	Penumpang	38	Kasugihan	KH	Kelas 3	Operasi
23	Doplang	DPL	Kelas 2	Operasi	39	Karangkandri	KKD	Kelas 3	Operasi
24	Randublatung	RBG	Kelas 2	Penumpang	40	Gumilir	GM	Kelas 3	Operasi
25	Larangan (Ke Smt)	LR	Kelas 3	Barang	Daop 6				
26	Suradadi	SD	Kelas 3	Operasi	1	Solo Balapan	SLO	Besar A	Penumpang
27	Petarukan	PTA	Kelas 3	Operasi	2	Solo Jebres	SK	Besar C	Penumpang
28	Kuripan	KRP	Kelas 3	Operasi	3	Purwosari	PWS	Besar C	Penumpang
29	Plabuan	PLB	Kelas 3	Operasi	4	Klaten	KT	Kelas 1	Penumpang
30	Tegowanu	TGW	Kelas 3	Operasi	5	Brambanan	BBN	Kelas 1	Penumpang
31	Gubug	GUB	Kelas 3	Penumpang	6	Bandara Adi Soemarmo	SMO	Kelas 1	Penumpang
32	Karang Jati	KGT	Kelas 3	Penumpang	7	Ceper	CE	Kelas 2	Penumpang
33	Sedadi	SDI	Kelas 3	Penumpang	8	Sragen	SR	Kelas 2	Penumpang
34	Tanggung	TGG	Kelas 3	Operasi	9	Jenar	JN	Kelas 3	Penumpang
35	Kedungjati	KEJ	Kelas 3	Penumpang	10	Wojo	WJ	Kelas 3	Penumpang
36	Padas	PDS	Kelas 3	Operasi	11	Srowot	SWT	Kelas 3	Penumpang
37	Telawah	TLW	Kelas 3	Penumpang	12	Delanggu	DL	Kelas 3	Penumpang
38	Karangsono	KSO	Kelas 3	Penumpang	13	Gawok	GW	Kelas 3	Penumpang
39	Jambon	JBN	Kelas 3	Penumpang	14	Solo Kota	STA	Kelas 3	Penumpang
40	Panunggalan	PNL	Kelas 3	Operasi	15	Sukoharjo	SKH	Kelas 3	Penumpang
41	Sulur	SL	Kelas 3	Operasi	16	Pasar Nguter	PNT	Kelas 3	Penumpang
42	Wadu	WDU	Kelas 3	Operasi	17	Wonogiri	WNG	Kelas 3	Penumpang
43	Kapuan	KPA	Kelas 3	Operasi	18	Palur	PL	Kelas 3	Operasi
DAOP 5					19	Kemiri	KMR	Kelas 3	Operasi
1	Purwokerto	PWT	Besar A	Penumpang	20	Masaran	MSR	Kelas 3	Operasi
2	Kutoarjo	KTA	Besar A	Penumpang	21	Kebon Romo	KRO	Kelas 3	Operasi
3	Kroya	KYA	Besar B	Penumpang	22	Kedung Banteng	KDB	Kelas 3	Operasi
4	Maos	MA	Besar C	Penumpang	23	Kalioso	KO	Kelas 3	Operasi
5	Kebumen	KM	Besar C	Penumpang	24	Salem	SLM	Kelas 3	Penumpang
6	Karangtalun	KRL	Besar C	Barang	25	Sumberlawang	SUM	Kelas 3	Operasi
7	Cilacap	CP	Kelas 1	Penumpang	26	Goprak	GPK	Kelas 3	Operasi
8	Karanganyar	KA	Kelas 1	Penumpang	27	Kadipiro	KDO	Kelas 3	Penumpang
9	Gombong	GB	Kelas 1	Penumpang					

Sumber : BTP Jawa Bagian Tengah, 2024

2. Infrastruktur Pendukung Keselamatan Perjalanan Transportasi

Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Tengah masih relatif tinggi dan memerlukan penanganan serius. Selama periode 2020–2024, rata-rata korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mencapai kurang lebih 4.000 jiwa per tahun, atau setara dengan sekitar 11 orang per hari. Pada tahun 2024, Indeks Fatalitas Kecelakaan per 100.000 penduduk tercatat sebesar 10,89, menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2023. Namun demikian, angka tersebut tetap mencerminkan tingginya tingkat risiko di jalan raya. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, peningkatan keselamatan lalu lintas perlu ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah, melalui langkah-langkah penanganan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Adapun selengkapnya data terkait tingkat fatalitas kecelakaan di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.40. Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kematian (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk
2020	3.508	36.516.035	9,61
2021	3.750	36.742.501	10,21
2022	4.409	37.032.410	11,91
2023	4.302	37.488.277	11,62
2024	4.130	37.892.300	10,89

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Data kecelakaan di Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 mengalami kenaikan setiap tahun nya, jumlah kejadian kecelakaan pada tahun 2024 sebesar 31.444 meningkat dibandingkan tahun 2023.

Tabel II.41. Data Kecelakaan di Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	Jumlah					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Kecelakaan Lalu Lintas						
1	Jumlah Kejadian/Tahun	21.396	22.521	30.730	31.425	31.444	Kasus
	Jumlah Kejadian /Hari	58,62	61,70	84,19	86,10	86,15	Kasus
	Jumlah Kejadian /Jam	2,44	2,57	3,51	3,59	3,59	Kasus
2	Korban Meninggal Dunia/Tahun	3.508	3750	4.409	4.302	4.130	Orang
	Korban Meninggal Dunia/Hari	9,61	10,27	12,08	11,79	11,32	Orang
	Korban Meninggal Dunia/Jam	0,40	0,43	0,50	0,49	0,47	Orang
3	Korban Luka Berat	48	77	77	60	65	Orang
4	Korban Luka Ringan	24.495	25.847	35.869	36.915	37.275	Orang
5	Kerugian Materiil (Rp.000)	14.746.525	16.836.435	24.819.905	44.763.625	37.369.660	Rupiah
B	Jenis Kecelakaan Lalu Lintas						
1	Laka Tunggal	4.290	4.781	6.119	6968	5.220	Kejadian
2	Depan - Depan	2.464	3.035	3.995	5.868	5.750	Kejadian
3	Depan - Belakang	2.812	3.348	4.567	6.870	7.768	Kejadian
4	Depan - Samping	6.911	5.927	9.474	6.038	6.736	Kejadian

No	Uraian	Jumlah					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
5	Beruntun / Karambol	385	391	514	412	456	Kejadian
6	Tabrak Manusia	1.743	1.741	2.282	3.159	3.471	Kejadian
7	Tabrak Lari	1.222	1.679	1.814	2.094	2.035	Kejadian
8	Tabrak Hewan	10	9	6	16	8	Kejadian
9	Lain-Lain	1.559	1.748	1.992	-	-	Kejadian
	Jumlah	21.396	22.659	30.763	31.425	31.444	Kejadian
C	Profesi Pelaku Laka Lantas						
1	Pegawai Negeri Sipil	556	547	671	644	507	Orang
2	Karyawan / Swasta	5.593	5.172	7.215	9.955	9.479	Orang
3	Mahasiswa / Pelajar	2.807	3.779	5.660	5.826	5.793	Orang
4	Pengemudi	68	68	116	518	425	Orang
5	TNI	68	54	59	31	24	Orang
6	Polri	99	89	80	53	49	Orang
7	Lain-Lain	9.261	10.260	12.798	13.283	13.759	Orang
	Jumlah	18.452	19.969	26.599	30.310	30.036	Orang
D	Usia Pelaku Laka Lantas						
1	< 15 Tahun	97	91	179	816	787	Orang
2	16 - 30 Tahun	1.495	1.724	3.016	2.443	2.303	Orang
3	31 – 40 Tahun	7.989	9.829	11.794	14.526	14.906	Orang
4	41 - 50 Tahun	4.329	4.869	5.694	8.758	5.378	Orang
5	> 51 Tahun	4.542	5.106	5.916	3.817	6.662	Orang
	Jumlah	18.452	21.619	26.599	30.360	30.036	Orang
E	SIM Pelaku Laka Lantas						
1	A	1.878	2.141	2.229	1.653	1.546	Unit
2	A UMUM	13	11	25	5	4	Unit
3	B1	593	659	526	366	327	Unit
4	B1 UMUM	428	467	459	248	258	Unit
5	BII	133	138	191	76	59	Unit
6	B II UMUM	746	836	1.488	429	405	Unit
7	C	7.918	8.870	8.503	5.539	4.898	Unit
8	SIM Internasional	-		-	1	-	Unit
9	Tanpa SIM	6.742	23.669	13.178	16.604	22.539	Unit
	Jumlah	18.451	36.791	26.599	24.921	30.036	Unit
F	Kendaraan Yang Terlibat Laka Lantas						
1	Sepeda Motor	26.028	29.531	37.759	42.973	44.389	Unit
2	Mobil Penumpang	2.720	3.020	3.688	4.319	2.060	Unit
3	Mobil Bus	280	307	280	372	2.632	Unit
4	Mobil Barang	3.002	3.892	4.267	4.867	4.924	Unit
5	Kendaraan Khusus	17	82	53	15	35	Unit
6	Kendaraan Tidak Bermotor	1.512	1.504	2.188	1.660	1.633	Unit
	Jumlah	33.559	38.336	48.235	54.206	55.673	Unit
G	Lokasi Kejadian Laka Lantas						
1	Berdasarkan Kawasan						
a	Kawasan Pemukiman	14.306	15.118	21.948	24.057	24.102	Perkara
b	Kawasan Perbelanjaan	212	2.698	1.005	2.169	2.410	Perkara
c	Perkantoran	2.145		2.249	1.738	2.283	Perkara
d	Kawasan Wisata	112	104	129	117	346	Perkara
e	Kawasan Industri	23	155	18	89	382	Perkara
f	Lain-lain	4.598	4.581	5.414	3.255	1.921	Perkara

No	Uraian	Jumlah					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah	21.396	22.656	30.763	31.425	31.444	Perkara
2	Berdasarkan Status Jalan						
a	Nasional	4.266	4.598	5.701	7.156	6.772	Perkara
b	Propinsi	5.075	5.282	6.344	7.088	7.136	Perkara
c	Kab/Kota	9.821	10.474	16.133	14.053	14.428	Perkara
d	Jalan TOL	162	224	243	302	283	Perkara
e	Lainnnya	2.072	227	2.342	2.826	2.825	Perkara
	Jumlah	21.396	20.805	30.763	31.425	31.444	Perkara
3	Berdasarkan Fungsi Jalan						
a	Arteri	5.220	4.345	5.219	7.860	8.145	Perkara
b	Kolektor	9.069	11.345	15.026	13.416	13.015	Perkara
c	Lokal	6.050	6.128	9.552	9.847	10.001	Perkara
d	Lingkungan	941	691	766	302	283	Perkara
e	Lain-Lain	116	12	200	-	-	Perkara
	Jumlah	21.396	22.521	30.763	31.425	31.444	Perkara
H	Faktor Penyebab Laka Lantas						
1	Manusia	17.006	15.710	25.585	31.143	29.660	Perkara
2	Alam	216	651	666	74	421	Perkara
3	Kelaikan Kendaraan	388	206	211	6	440	Perkara
4	Kelaikan Jalan	3.786	4.005	4.301	202	923	Perkara
	Jumlah	21.396	20.572	30.763	31.425	31.444	Perkara
I	Kecelakaan Lalu Lintas Menonjol						
1	Jumlah Kejadian	3	4	6	4	4	Kasus
2	Korban Meninggal Dunia	13	27	41	25	23	Orang
3	Korban Luka Berat	1	3	2	3	1	Orang
4	Korban Luka Ringan	20	27	22	48	43	Orang
5	Kerugian Materiil (Rp.000)	52.200	125.000	215.000	3.105.000	235.000.	Rupiah

Sumber : Polda Jateng, 2025

Di Provinsi Jawa Tengah, rata-rata terdapat 0,5 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas setiap jam, atau setara dengan 11 orang per hari. Tingginya angka fatalitas tersebut sebagian besar menimpa usia produktif (16–50 tahun) yang merupakan penopang utama perekonomian keluarga. Kondisi ini menjadikan kecelakaan lalu lintas bukan hanya persoalan keselamatan transportasi, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Kehilangan pencari nafkah utama dalam hitungan jam berpotensi mendorong lahirnya keluarga miskin baru, sehingga isu keselamatan lalu lintas harus dipandang sebagai isu strategis pembangunan daerah yang mendesak ditangani secara komprehensif.

a. Fasilitas Keselamatan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2/Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor Primer-3 sebagai JalanProvinsi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 173 ruas (2.440,12 Km). Terbagi dalam 6 (enam) Balai Pengelola Sarana

Prasarana Perhubungan Wilayah, adapun masing-masing Balai mengampu Ruas Jalan Provinsi sebagai berikut :

Tabel II.42. Jumlah dan Panjang Ruas Jalan Provinsi Per BPSPP Wilayah

No	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP)	Lokasi	Jumlah Ruas	Panjang (Km)	Prosentase Panjang Ruas Jalan (%)	Jumlah Ruas Jalan Kondisi Ideal	Persentase Ruas Jalan Kondisi Ideal
1	BPSPP Wilayah I Kelas A	Semarang	28	413,92	16,96%	2	7,14%
2	BPSPP Wilayah II Kelas A	Pati	23	347,39	14,23%	2	8,69%
3	BPSPP Wilayah III Kelas A	Surakarta	39	506,78	20,77%	2	5,12%
4	BPSPP Wilayah IV Kelas A	Magelang	24	380,39	13,87%	0	0
5	BPSPP Wilayah V Kelas A	Banyumas	33	320,25	19,07%	5	15,15%
6	BPSPP Wilayah VI Kelas A	Pekalongan	27	471,78	19,33%	0	0
Jumlah			173	2.440,12	100%	11	6,35

Sumber : diolah dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 622/2 tahun 2023

Pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (Surakarta) paling banyak mengampu Ruas Jalan Provinsi sebanyak 39 Ruas Jalan dengan Panjang 506,78 Km (20,77%).

Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi merupakan salah satu kegiatan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini mencakup penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), rambu lalu lintas, marka jalan, serta berbagai fasilitas penunjang keselamatan lainnya yang diarahkan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. adapun perkembangan jumlah pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dari Tahun 2023-2025 sebagai berikut :

Tabel II.43. Perkembangan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi

No	Uraian	Kebu-tuhan	Tahun			Keter-sediaan s.d 2025	Sisa Kebu-tuhan	Keter sediaan %
			2023	2024	2025 (Rencana)			
1	Rambu (Buah)	19.169	350	100	100	13.670	5.499	71,31
2	RPPJ (Unit)	1.398	29	8	8	1.281	117	91,63
1.	Marka (m')	2.404.741	60.000	15.000	219.000	1.255.896	1.148.845	52,23
4	*Guardrail* (Beam)	15.810	-	-	-	7.580	7.960	47,94
5	LPJU (Unit)	37.597	250	46	404	15.229	22.368	40,51
6	APILL (Unit)	246	2	-	1	213	33	86,59
7	*Warning Light* (Unit)	799	10	-	-	456	343	57,07

Sumber : Diolah dari GIS Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pemenuhan perlengkapan jalan menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung keselamatan serta kelancaran transportasi di Jawa Tengah. Sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang termuat dalam RPJMD 2025-2029, pada tahun 2026 pemenuhan perlengkapan jalan difokuskan pada jalur distribusi pangan sebagai bagian dari penguatan

lumbung pangan daerah. Selanjutnya, pada tahun 2027 prioritas diarahkan untuk mendukung jalur pariwisata yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, sehingga mampu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi wisatawan maupun masyarakat. Pada tahun 2028, perhatian difokuskan pada penguatan jalur industri serta akses menuju kawasan pedesaan yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi, dengan memastikan standar keselamatan terpenuhi. Adapun pada tahun 2029–2030, pemenuhan perlengkapan jalan diprioritaskan pada ruas jalan provinsi yang masih memerlukan intervensi guna menjamin terciptanya jaringan jalan yang selamat, andal, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi

Penanganan daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan provinsi di masing-masing Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah merupakan salah satu kegiatan strategis dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) LLAJ, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Kajian Rencana Aksi Keselamatan (RAK) LLAJ yang menjadi dasar perencanaan intervensi pada lokasi-lokasi prioritas. Berdasarkan dokumen Kajian RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, tercatat sebanyak 86 lokasi daerah rawan kecelakaan yang tersebar di 66 ruas jalan provinsi. Penanganan lokasi tersebut diarahkan pada penyediaan fasilitas keselamatan jalan, rekayasa lalu lintas, serta peningkatan kesadaran masyarakat, sehingga diharapkan mampu menurunkan angka kecelakaan sekaligus menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih aman, andal, dan berkelanjutan. Adapun jumlah Daerah Rawan Kecelakaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.44. Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Pada Masing-Masing BPSPP Wilayah 2020-2024

Unit Kerja	Total DRK	2023		2024		2025		
		Jumlah Penanganan DRK	Persentase akumulasi Penanganan DRK	Jumlah Penanganan DRK	Persentase akumulasi Penanganan DRK	Jumlah Penanganan DRK	Akumulatif Penanganan DRK	Persentase Akumulasi Penanganan DRK
BPSPP WILAYAH I	18	1	5,56%	1	11,11%	1	3	16,67%
BPSPP WILAYAH II	16	4	25,00%	1	31,25%	1	6	37,50%
BPSPP WILAYAH III	9	0	0,00%	2	22,22%	1	3	33,33%
BPSPP WILAYAH IV	12	0	0,00%	2	16,67%	1	3	25,00%
BPSPP WILAYAH V	7	0	0,00%	1	14,29%	1	2	28,57%
BPSPP WILAYAH VI	24	3	12,50%	5	33,33%	1	9	37,50%
	86	8	9,30%	12	23,26%	6	26	30,23%

Sumber : Diolah dari Dokumen RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dari tabel diatas Pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (Pekalongan) paling banyak daerah rawan kecelakaan pada Ruas Jalan Provinsi sebanyak 25

lokasi (29,07%). Secara rinci Daerah rawan kecelakaan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.45. Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Pada BPSPP Wilayah

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH I				
1	Ambarawa-Bandungan	-7.227324, 110.345952	Kab. Semarang	1. Penambahan Warning Light 2. Penambahan rambu peringatan 3. Penambahan pita penggaduh
2	Salatiga-Kedungjati/ BTS. Kab Grobogan	-7.260675, 110.517879	Kab. Semarang	1. Rambu Chevron 4 2. Warning Light 3. Rumble Strip 4. PJU 1 Section 5. Rambu Hati-Hati 6. Marka Tepi, Marka Tengah dan Zebra Cross SMPN 1
3	Ruas Jalan Semarang-Purwodadi Grobogan	-7.041666, 110.821512	Kab. Grobogan	1. Perlu dilakukan pemasangan rambu batas kecepatan sesuai 2. Perlu penambahan rambu peringatan DRK dan RPPJ 3. Pemasangan Warning Light 4. Pemasangan rumble strip mendekati simpang
4	Salatiga-Kedungjati/ BTS. Kab Grobogan	-7.235245, 110.539805 Beringin- Salatiga	Kab. Semarang	1. Penambahan rambu batas kecepatan 2. Rambu Chevron 3. Warning Light 4. Pita Penggaduh
5	Weleri – Patean (BTS. Kab. Temanggung)	-7.040556 110.048694 (Weleri - Pagaruyung - Sukorejo)	Kab. Kendal	1. Guardrail (Jumlah Beam) 2. Delineator 3. Rambu Belok Belok 4. Rambu Hati Hati 5. PJU
6	Gubug-Kapung- Kedungjati/ BTS. Kab. Semarang	-7.260700, 110.517914	Kab. Semarang	1. Warning Light 2. Rppj 3. Marka Tepi : 4. Pita Penggaduh 5. Chevron
7	Jalan Raya Semarang Purwodadi, Lekok, Penawangan, Kab. Grobogan.	-7.024890 110.500694 s/d 7.024892, 110.500712	Kab. Grobogan	
8	Jalan Raya Desa Kemantren Godong Purwodadi	-7.025084, 110.7785 s/d -7.025942, 110,781019	Kab. Grobogan	
9	Weleri – Patean (BTS. Kab. Temanggung)	-7.038088, 110.049982	Kab. Kendal	1. Gruardrail 2. Rambu DRK 3. Chevron
10	Lemahbang-Kaloran (Kab. Semarang)	-7.222158, 110.373094	Kab. Semarang	
11	Sukorejo - Plantungan / Blimbing	-7.086051, 110.008363	Kab. Kendal	
12	Bts. Lingkar Salatiga - Ngablak / Bts.Kab. Magelang (Tanjakan Salib Putih)	-7.356289, 110.482881	Kota Salatiga	
13	Bts. Lingkar Salatiga - Ngablak / Bts.Kab. Magelang (Pertigaan Kopeng Arah Cuntel)	-7.397128, 110.421409	Kab. Semarang	
14	Temanggung - Kaloran / Bts.Kab. Semarang (Pertigaan 09)	-7.271013, 110.235394	Kab. Semarang	
15	Semarang - Godong (Pertigaan Pasar Tegowanu)	-7.049705, 110.599495	Kab. Grobogan	
16	Ungaran - Cangkiran (Perempatan Sumurjurang)	-7.104357, 110.388205	Kota Semarang	
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH II				
17	Kudus – Margoyoso / BTS. Kab. Jepara (SK KALIWUNGU / BTS. KAB KUDUS - KALINYAMATAN)	-6.640988, 110.709716 (Ruas Jalan Jepara - Kudus)	Kab. Jepara	1. Perlu dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap pengurangan titik konflik pada bundaran 2. Perlunya pengecatan ulang marka 3. Perlu dilakukan survei pencacah lalu lintas dan dilakukan simulasi alternative 4. pemasangan APILL dalam pengaturan lalu lintas 5. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
18	Kudus-Margoyoso/BTS. Kabupaten Jepara (SK JALAN KUDUS - KALIWUNGU / BTS KAB JEPARA)	-6.640988, 110.709716 (Jepara - Kudus)	Kab. Jepara	1. Perlu dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap pengurangan titik konflik pada bundaran 2. Perlunya pengecatan ulang marka 3. Perlu dilakukan survei pencacah lalu lintas dan dilakukan simulasi alternative pemasangan APILL dalam pengaturan lalu lintas 4. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas
19	Pati-Tayu	-6.651748, 111.061809 (Desa Mojoagung KM 87+600)	Kab. Pati	1. Pita penggaduh 2. Rambu turunan dan jalan naik 3. Papan Peringatan DRK 4. Perimbasan ranting pohon yang menutupi PJU
		-6.5606007 LS,111.0412319BT (Desa Sendangrejo KM 98+950)	Kab. Pati	1. Rambu simpang 3 2. Rambu DRK 3. Pengecatan marka jalan 4. Pita penggaduh 5. Zebra cross 6. Penambahan Warning Lamp 7. Tambal lubang jalan
		-6.610464, 111.053448 (Ngemplak Kidul, Margoyoso KM 92+300)	Kab. Pati	1. Rambu Traffic Light 2. Rambu DRK 3. Dilakukan pengaspalan jalan 4. Pita penggaduh 5. Ditambahkan PJU 6. Pelapisan ulang bahu jalan pada sisi kanan sepanjang 50 meter (area Traffic Light)
20	Keling/BTS.Kab. Jepara_Tayu	-6.5345489 LS,110.9416022 BT (Desa Plaosan KM 113+700) Jl. Keling-Tayu	Kab. Pati	1. Rambu hati-hati 2. Rambu DRK 3. Rambu tikungan tajam 4. Pita penggaduh 5. Penambahan Warning Lamp 6. Penambahan PJU
21	Kunduran – Ngawen – Blora	-6.99763 LS,111.38161 BT (POM BENSIN NGAWEN)	Kab. Blora	1. Pita penggaduh 2. Paku jalan sepanjang 3. Rambu peringatan hati hati 4. Rambu papan peringatan DRK 5. Sosialisasi lewat spanduk dan Razia lalu lintas (operasi gabungan) 6. Penanganan WL yang mati
		-7.01918 LS,111.30716 BT	Kab. Blora	1. WL (warning lamp) 2. Rambu DRK 3. Dilakukan pemarkaan baru 4. Pita penggaduh 5. Paku jalan sekitar 6. Ditambahkan PJU 7. Pelapisan bahu jalan pada sisi kanan yang beda tinggi dengan jalan utama
		(Simpang 4 Trembul Rejo Ngawen)	Kab. Blora	
		-6.5345489 LS,111.9416022 BT (SMP NEGERI 1 NGAWEN)	Kab. Blora	1. Rambu Peringatan hati-hati 2. Rambu papan peringatan DRK 3. Rambu Peringatan banyak anak menyebrang 4. Rambu Petunjuk fasilitas penyebrangan 5. Pembuatan zebra cross 6. Pita penggaduh sebelum dan sesudah lokasi 7. Paku jalan 8. Penambahan Warning Lamp 9. Penambahan PJU

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
		-7.05042 LS,111.24209 BT (SMP NEGERI 1 KUNDURAN BLORA)	Kab. Blora	1. Rambu hati-hati 2. Rambu petunjuk fasilitas penyebrangan 3. Rambu papan peringatan DRK 4. Rambu peringatan banyak anak menyebrang 5. Pita penggaduh (sebelum dan sesudah lokasi) 6. Penambahan Warning Lamp 7. Penambahan PJU 8. Paku jalan sekitar 300 m
22	Jl. Purwodadi (Kudus)	-6.837328, 110.832453	Kab. Kudus	
23	Jl. Pati - Tayu (Ketanen)	-6.6502, 111.0615	Kab. Pati	
24	Jl. Kudus – Jepara Ds. Sidorekso Kec. Kaliwungu Kab. Kudus (SK JALAN KUDUS - KALIWUNGU / BTS KAB JEPARA)	-6.46217, 110,47017 SD - 6.772689, 110,783815	Kab. Kudus	
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH III				
25	Boyolali-Selo-Jrakah/BTS.Kab. Magelang	-7.7057516, 110.508244 (Tikungan Ngeplang)	Kab. Boyolali	1. Pelebaran Jalan 2. Pergerseran RPPJ Wisata 3. Penambahan Rambu peringatan tikungan, tanjakan, turunan, pertigaan 4. Pemeliharaan cermin tikungan 5. Penambahan Marka Tepi 6. Pemasangan Guardrail untuk mengganti gundukan tanah dan batu 7. Pemasangan papan peringatan terkait tumpahan solar
		-7.506692, 110.502837 (Irung Petruk)	Kab. Boyolali	1. Penambahan papan peringatan, rambu tikungan, jalan berkelok (Irung Petruk) 2. Penambahan chevron (Irung Petruk) 3. Penambahan penerangan jalan (Irung Petruk) 4. Penambahan rambu batas kecepatan (30km/jam) (Irung Petruk)
26	Boyolali-Selo-Jrakah/BTS.Kab. Magelang	-7.495766, 110.428196 (Selo -Jrakah)	Kab. Boyolali	1. Penertiban warung diatas drainase yang berlokasi di tanjakan 2. Penambahan rambu peringatan, tikungan, tanjakan 3. Penambahan penerangan jalan
27	Ruas Jalan Jatinom-Boyolali (Simpang 4 Jatinom depan Gapura Pesantren Al Manshurin)	-7.628043, 110.604904	Kab. Boyolali	1. Perlu dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap pengurangan titik konflik pada bundaran 2. Perlunya pemasangan rambu peringatan adanya simpang 4 3. Perlunya pemasangan warning light 4. Perlu dilakukan survei pencacah lalu lintas dan dilakukan simulasi alternative pemasangan APILL dalam pengaturan lalu lintas 5. Penegakan hukum terhadap pengguna jalan pelaku aggressive driving
28	Ruas Jalan Ahmad Yani, Surakarta (Ringin Semar)	-7.5593912, 110.834791	Kota Surakarta	1. Perlu dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap pengurangan titik konflik pada bundaran 2. Perlu dilakukan survei pencacah lalu lintas dan dilakukan simulasi alternative pemasangan APILL dalam pengaturan lalu lintas 3. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
29	Wonogiri Ngadirojo	-7.813228, 110.957312 (simpang 3 Bulusulur)	Kab. Wonogiri	1. Marka Solid 2. Paku jalan 3. Rabu Larangan Mendahului 4. Rambu Batas Akhir Larangan Mendahului
30	Nguter/ Bts. Kabupaten Sukoharjo – Wonogiri	-7.76989, 110.88792 (dekat Ponpes Mambaul Hikmah)	Kab. Wonogiri	1. Rambu Peringatan Simpang 3 2. Rambu Peringatan Pejalan kaki 3. Variable Message Sign 4. Rambu Larangan Mendahului 5. Rambu Batas Akhir larangan mendahului 6. Marka Solid 7. Paku jalan
31	RUAS SUKOHARJO-NGUTER/BTS. KAB. WONOGIRI	-7.704206,110.855046	Kab. Sukoharjo	
32	Jl. Lawu 172	-7.615597, 111,002065 s/d -7.616102, 111.003456;		1. Penambahan rambu hati-hati pada -7.525960, 110.817646 dan -7.525205, 110.817605; 2. Penambahan Warning Light (2 buah) pada -7.525363, 110.817639 dan -7.525767, 110.817586; 3. Penambahan marka tengah solid; 4. Penambahan marka tepi; 5. Penambahan rambu stop di -7.525593, 110.817692 6. Penambahan LPJU 1 section
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH IV				
33	Salaman-Bener/BTS. Kab Purworejo Kab magelang	-7.5733, 110.0769	Kab. Magelang	1. Pemasangan LPJU 2. Perbaikan rambu tanjakan (arah magelang) 3. Penambahan rambu batas kecepatan
34	BTS.Kab Magelang/ Bener-Maron (Kab purworejo)	-7.596748, 110.064989 Kalijambe (Maron-Bener)	Kab. Purworejo	1. Penambahan penerangan jalan 2. Penebalan marka 3. Perbaikan cermin tikung 4. Penambahan pita penggaduh 5. Penambahan papan peringatan 6. Rambu batas kecepatan 7. Pemasangan Rambu Chevron 8. Delineator 9. Reflektor guardrail 10. Warning Light 11. Pagar Pengaman jalan
35	Parakan-Patean / BTS. Kab. Kab temanggung Kendal	-7.127659, 110.080347 Candiroto- Bejen (temanggung)	Kab. Temanggung	1. Overlay dan Pelebaran jalan 2. Pemasangan Marka jalan 3. Penambahan penerangan jalan 4. Penambahan pita penggaduh 5. Penambahan jalur penyelamat 6. Penambahan papan peringatan
		-7.15873, 110.06397	Kab. Temanggung	1. Guardrail 2. Warning Light : 3. Pemasangan LPJU 4. Pemasangan rambu lalu lintas 5. Pemasangan cermin tikungan 6. Penebalan marka
36	Magelang-Ngablak/ BTS. Kab Semarang Kab Semarang	-7.519074, 110.355771 Magelang- Salatiga (Pakis)	Kab. Magelang	1. Pemasangan LPJU 2. Penambahan delineator 3. Pemasangan marka tepi 4. Perawatan rambu 5. Penambahan Rambu batas kecepatan
37	Bener-Maron (Bts. Purworejo) Kab Purworejo	-7.6140, 110.0621	Kab. Purworejo	1. Penambahan rambu peringatan 2. Penambahan rambu batas kecepatan 3. Penambahan RPPJ Wisata 4. Penambahan Warning light 5. Perbaikan marka 6. Penambahan rambu larangan parkir 7. Koordinasi dengan satpol PP terkait warung pada jembatan 8. Penambahan guardrail 9. Penggantian cermin tikung 10. Perbaikan warning light 11. Perbaikan marka 12. Penambahan rambu peringatan tanjakan dan turunan

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
38	Magelang Ngablak / BTS. Kab Semarang	-7.355943, 110.482977 Ruas Jalan Magelang - Salatiga (Simpang Empat Kumpulrejo / Salib Putih)	Kota Salatiga	1. Pembatasan Lalu Lintas terhadap kendaraan angkutan barang disertai pemasangan rambu peringatan pembatasan angkutan barang 2. Pembangunan kembali U-Turn yang ideal 3. Kajian yang komperehensif terhadap jalur penyelamat di lokasi tersebut
39	Magelang-Ngablak/BTS. Kab. Semarang	-7.444890, 110.351335	Kab. Magelang	1. Guardrail 2. Warning Light 3. Pemasangan rambu lalu lintas 4. Pemasangan Delineator 5. Penebalan marka
40	Jalan Jurusan Purworejo – Magelang Ikut Desa. Kaliboto Kec. Bener Kab. Purworejo.	-7.381970, 110.030719	Kab. Purworejo	
41	Jl Candiroto – Bejen tepatnya depan kantor Perhutani Dsn Saren Ds/Kec Bejen Kab Temanggung Prop Jawa Tengah	-7.127659, 110.080347	Kab. Temanggung	1. Pemasangan rambu kurangi kecepatan 2. Pemasangan rambu turunan Panjang 3. Pemasangan rambu gunakan gigi rendah
42	Jl. Magelang - Salatiga, Pakis, Magelang	-7.448945, 110,342838 s.d -7.446988, 110.347183;	Kab. Magelang	1. Pemasangan rambu hati hati 2. Pemasangan rambu turunan panjang
43	Wonosobo-Kejajar Kab Wonosobo	-7.244305, 109.951289	Kab. Wonosobo	1. Penambahan Warning Light 2. Penambahan Rambu Simpang Tiga 3. Penambahan papan peringatan
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH V				
44	Batur -Dieng Kab Banjarnegara	-7.20698, 109.9163 Wanayasa- Dieng	Kab. Banjarnegara	1. Penambahan delineator 2. Penambahan guardrail 3. Penambahan LPJU 4. Perbaikan dan penambahan marka 5. Penambahan papan peringatan DRK
45	Kejajar-Dieng (Kab Wonosobo)	-7.209880, 109.924685	Kab. Wonosobo	1. Penambahan LPJU 2. Penambahan papan peringatan sebelum dan sesudah Rest Area 3. Penambahan rambu batas kecepatan 4. Penambahan papan peringatan gunakan gigi rendah 5. Penambahan delineator 6. Penambahan papan peringatan kendaraan yang akan naik 7. penambahan papan peringatan DRK 8. Perbaikan dan penambahan marka 9. Penambahan Warning Light 10. Penambahan papan peringatan tanjakan/turunan panjang
46	Kertek-Kepil (wonosobo)	-7.389134, 109.963765	36	1. Perbaikan dan perawatan jalur penyelamat 2. Perawatan warning light 3. Overlay jalan menuju jalur penyelamat 4. Pagar Pengaman Jalan 5. Rambu Chevron 6. Delineator 7. Reflektor guardrail 8. Marka Zebra Cross 9. RPPJ 10. Rambu Peringatan 11. Papan Peringatan"
47	Jl Wadaslintang - Selokromo (Tanjakan Desa Panerusan)	-7.560116, 109.820249	Kab. Wonosobo	1. Penambahan rambu peringatan hati hati, tanjakan, turunan
48	Bobotsari- belik/ BTS. Kab Pemalang	-7.239676, 109.332104	Kab. Purbalingga	1. Penambahan rambu peringatan 2. Penambahan pita penggaduh 3. Penambahan Warning Light 4. Penambahan Rambu Batas Kecepatan
49	Bobotsari – Belik/ BTS.Kab. Pemalang	-7.244421, 109.334357	Kab. Purbalingga	1. Guardrail 2. Warning Light : 2 3. Penggantian lampu PJU

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
				dengan lampu LED 4. Pengecatan ulang marka di sekitar lokasi 5. Penambahan rambu petunjuk jalur penyelamat 6. Penambahan rambu peringatan pengarah tikungan kiri/ kanan 7. Penambahan rambu dilarang mendahului 8. Penyediaan rumble strips sebelum jalur penyelamat 9. Rambu Kurangi Kecepatan
50	Sokaraja - Kalimanah	-7.443694, 109.326025	Kab. Banyumas	1. Guardrail 2. Warning Light : 3. Penggantian lampu PJU dengan lampu LED 4. Pengecatan ulang marka di sekitar lokasi 5. Penambahan rambu peringatan hati-hati 6. Penambahan rambu peringatan DRK 7. Penambahan rambu batas kecepatan 8. Penyediaan rumble strips sebelum dan sesudah lokasi DRK
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH VI				
51	Bandungsari-Salem Kab brebes	-7.239676, 109.332104 (Gunung Lio-Brebes)	Kab. Brebes	1. Penambahan LPJU 2. Pemasangan guardrail 3. Penambahan rambu peringatan hati - hati dan tanah longsor 4. Penambahan rambu Chevron
		-7.093521, 108.807580 (Jembatan Bandungsari)	Kab. Brebes	1. Rambu peringatan rawan longsor 2. Overlay Jalan 3. Pemberian marka 4. Pemasangan guardrail
		-7.096942, 108.803907 (Tanjakan Depan SD)	Kab. Brebes	1. Pemasangan rambu peringatan tanjakan dan tikungan 2. Pemasangan rambu chevron 3. Penambahan marka tepi
		-7.092746, 108.807137	Kab. Brebes	1. Penambahan Guardrail
		-7.135487, 108.790767	Kab. Brebes	1. Penambahan RPPJ 2. Pemasangan Cermin Tikung
52	Pemalang - Randudongkal	-6.975978, 109.381052	Kab. Pemalang	1. Papan Peringatan 2. WL 3. Rambu Peringatan Hati2 4. Rambu Menyeberang
53	Randudongkal – Belik/Bts Kab. Purbalingga	-7.133070, 109.304597		1. Penebangan pohon di tanjakan cilukba 2. Cutting tanjakan cilukba 3. Pemasangan Guardrail 4. Pemasangan RLL dilarang mendahului 5. Rambu Peringatan dgn kata-kata 6. Pemasangan PJU
54	Ketanggungan – Songgom	6°57'14.12"S 108°53'25.62"T	Kab. Brebes	1. Pemasangan rambu peringatan tikungan berkelok
		6°59'39.85"S 108°55'11.92"T	Kab. Brebes	1. Pemasangan rambu peringatan tikungan berkelok
		7° 5'33.22"S 108°59'1.73"T	Kab. Brebes	1. Pemasangan rambu peringatan tikungan berkelok
		7° 6'16.14"S 108°59'1.01"T	Kab. Brebes	1. Pemasangan rambu peringatan tikungan tajam
55	Randudongkal – Belik/Bts Kab. Purbalingga (Rest Area Indah Sari)	-7.169092, 109.318664	Kab. Pemalang	1. WL 2. Papan Peringatan 3. Rumble Strip
56	Moga - Morongso / Bts.Kab.Tegal (SMK Al Falah)	-7.122779, 109.243573	Kab. Pemalang	1. Rambu Peringatan 2. Rambu Menyeberang 3. Warning Light 4. Rumble Strip 5. Zoss

NO	RUAS JALAN	KOORDINAT	Kab/Kota	REKOMENDASI KEBUTUHAN
57	Jl raya Pekajangan – Kedungwuni		Kab Pekalongan	
58	Jl raya Kedungwuni – Podo Kec. Kedungwuni.		Kab Pekalongan	
59	Batang - Wonotunggal - Surjo (Pertigaan Takzaka)	-7.040339, 109.802370	Kab. Batang	
60	Kebonagung - Bts.Kab. Batang (Pertigaan SDN Karangsari)	-7.031623, 109.615187	Kab. Pekalongan	
61	Banyuputih - Plantungan / Bts Kab. Kendal (SDN Sukomangli)	-7.0552957,109.9022149	Kab. Batang	
62	Pemalang - Randudongkal (Bantarbolang)	-7.053953, 109.379521	Kab. Pemalang	1. Cermin Tikung 2. Chevron (4 Bh) 3. Perbaikan Guardrail + reflektor 4. Marka 5. Rambu Peringatan
63	Jatinegara/Bts.Kab.Pemalang - Slawi (Pertigaan Desa Bogares Kidul)	-6.990626, 109.164985	Kab. Tegal	
64	Bumiayu - Sirampog (Pasar Sirampog)	-7.210080, 109.087037	Kab. Tegal	1. Cermin Tikung 2. Papan Peringatan 3. Rambu Peringatan 4. Marka 5. LPJU
65	Jl. Raya Ds. Randudongkal - Pemalang		Kab. Pemalang	
66	Jl. Raya Ds. Belik – Pemalang		Kab. Pemalang	

Sumber : Diolah dari Dokumen RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pemenuhan fasilitas keselamatan pada Daerah rawan kecelakaan tersebut akan dilakukan bertahap oleh Dinas Perhubungan.

c. Pelaksanaan *Ramp Check*

Ramp check bertujuan untuk meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan. Sesuai dengan kewenangannya pelaksanaan *ramp check* dilakukan pada 23 Terminal Tipe B. Selama tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan pada 20.058 kendaraan dengan hasil 16.568 kendaraan tidak terdapat pelanggaran dan 3.493 kendaraan melakukan pelanggaran yang didominasi pelanggaran administrasi.

Tabel II.46. Pelaksanaan *Ramp Check* di Terminal Tipe B Pada Masing-Masing BPSPP Wilayah Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Kendaraan			Pelanggaran		
		Diperiksa	Tidak Melanggar	Melanggar	Administrasi	Operasional	Teknis
1	**BPSPP WIL I**	**2237**	**1148**	**1089**	**1089**	**0**	**0**
a.	Penggaron	701	700	1	1	0	0
b.	Bintoro	750	0	750	750	0	0
c.	Purwodadi	786	448	338	338	0	0
2	**BPSPP WIL II**	**1261**	**1069**	**195**	**183**	**0**	**18**
a.	Gagak Rimang	1261	1069	195	183	0	18
3	**BPSPP WIL III**	**6.230**	**4.972**	**1.258**	**1.256**	**0**	**2**
a.	Terminal Sukoharjo	360	284	76	76	0	0
b.	Terminal Jatisrono	1.080	894	186	186	0	0
c.	Terminal Baturetno	84	78	6	6	0	0
d.	Terminal Purwantoro	566	351	215	215	0	0
e.	Terminal Penggung	1.325	865	460	458	0	2
f.	Terminal Tegalgede	155	11	144	144	0	0
g.	Terminal Pilangsari	1.395	1.391	4	4	0	0

No	Uraian	Jumlah Kendaraan			Pelanggaran		
		Diperiksa	Tidak Melanggar	Melanggar	Administrasi	Operasional	Teknis
h.	Terminal Tawangmangu	293	242	51	51	0	0
i.	Terminal Pracimantoro	639	575	64	64	0	0
j.	Kartasura	333	281	52	52	0	0
4	**BPSPP WIL IV**	**6.830**	**6.319**	**511**	**329**	**-**	**182**
a.	Terminal Drs. Prayitno	3.057	2.783	274	191	-	83
b.	Terminal Madureso	2.952	2.729	223	138	-	85
c.	Terminal Kutoarjo	821	807	14	-	-	14
5	**BPSPP WIL V**	**3.353**	**2.873**	**480**	**148**	**309**	**23**
a.	Terminal Purbalingga	1.822	1.557	265	39	217	9
b.	Terminal Banjarnegara	1.531	1.316	215	109	92	14
6	**BPSPP WIL VI**	**3500**	**3060**	**440**	**215**	**101**	**124**
a.	Kajen	871	747	124	60	23	41
b.	Banyuputih	895	733	162	79	34	49
c.	Tanjung	874	804	70	36	25	9
d.	Bumiayu	860	776	84	40	19	25
TOTAL 1 sd 6		**20.058**	**16.568**	**3.493**	**3.072**	**101**	**326**

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

d. Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan

Untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan, diperlukan upaya peningkatan jumlah kendaraan yang laik jalan melalui pelaksanaan uji berkala. Kegiatan uji laik jalan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan uji berkala di daerah. Semakin banyak Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji, semakin tinggi pula tingkat kepastian keselamatan operasional kendaraan di jalan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kendaraan yang memenuhi standar kelaikan jalan menjadi salah satu indikator penting dalam upaya mewujudkan sistem transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan di Jawa Tengah.

Tabel II.47. Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2024 di Jawa Tengah

No.	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	KBWU Total (Yang Diuji)	KBWU Yang Lulus Uji
BPSPP Wil I			
1.	Kota Semarang	65.138	65.138
2.	Kab. Semarang	16.360	16.101
3.	Kota Salatiga	5.649	4.929
4.	Kab. Demak	11.403	10.861
5.	Kab. Grobogan	10.082	10.082
6.	Kab. Kendal	8.133	8.038
BPSPP Wil II			
7	Kab. Kudus	9.730	9.715
8	Kab. Pati	9.599	9.555
9	Kab. Rembang	8.663	8.494

10	Kab. Blora	3.392	3.392
11	Kab. Jepara	16.111	15.528
BPSPP Wil III			
12	kab. Boyolali	7.514	7.223
13	Kota Surakarta	23.549	23.534
14	Kab. Sukoharjo	12.864	12.549
15	Kab. Wonogiri	12.082	12.014
16	Kab. Klaten	15.015	14.209
17	Kab. Sragen	12.136	12.122
18	Kab. Karanganyar	13.785	13.738
BPSPP Wil IV			
19	Kota Magelang	7.244	6.449
20	Kab. Magelang	19.156	19.156
21	Kab. Kebumen	8.060	8.060
22	Kab. Purworejo	5.554	5.267
23	Kab. Temanggung	8.266	8.085
BPSPP Wil V			
32.	Kab. Wonosobo	11.098	10.286
33.	Kab. Banyumas	13.886	11.606
34.	Kab. Cilacap (Majenang)	1.045	1.045
35.	Kab. Cilacap	11.951	11.776
36.	Kab. Purbalingga	12.455	11.933
37.	Kab. Banjarnegara	12.914	12.914
BPSPP Wil VI			
7.	Kab. Batang	7.520	7.474
8.	Kab. Pekalongan	6.106	6.048
9.	Kota Pekalongan	7.019	6.963
10.	Kota Tegal	6.421	6.421
11.	Kab. Tegal	18.131	17.876
12.	Kab. Pemalang	11.889	11.554
13.	Kab. Brebes (Pagojengan)	4.002	3.996
14.	Kab. Brebes (Kluwut)	12.736	12.732
Jumlah		**446.658**	**436.863**

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

e. Penanganan perlintasan sebidang

Perlintasan kereta api sebidang adalah perpotongan antara jalur kereta api dengan bangunan lain (pada umumnya jalan raya) yang dibuat sebidang. Perlintasan sebidang masih menjadi salah satu titik kritis yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 83 kasus kecelakaan di perlintasan sebidang yang berada dalam wilayah kewenangan DAOP 4 Semarang, DAOP 5 Purwokerto, dan DAOP 6 Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlintasan sebidang masih menjadi permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan. Sebagai respons, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menjadikan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sebagai salah satu prioritas strategis. Upaya yang dilakukan mencakup penyediaan dan pemenuhan fasilitas pengaman perlintasan hingga peningkatan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kabupaten/kota dan PT KAI. Langkah ini sejalan dengan Rencana Aksi Keselamatan Jalan yang menargetkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus mendukung visi pembangunan

transportasi Jawa Tengah yang aman, selamat, dan berkelanjutan.

Provinsi Jawa Tengah terdapat 1.369 perlintasan jalan dengan kereta api, Sebagian besar perlintasan tersebut berada di ruas jalan kabupaten/kota sebanyak 1.303 perlintasan, adapun rincian perlintasan di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel II.48. Data Perlintasan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Status Jalan	Jumlah Perlintasan Dengan Rel Kereta Api		Perlintasan Tidak Sebidang				Perlintasan Sebidang			
				Fly Over		*Underpass*		Berpalang Pintu & Dijaga		Tidak Ada Palang Pintu	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1.	Nasional	38	2.78%	10	41.67%	6	7.06%	22	5.93%	1	0.11%
2.	Provinsi	27	1.83%	1	4.17%	1	0.00%	24	6.47%	1	0.11%
3.	Kab/Kota	1304	95.39%	13	54.17%	79	92.94%	325	87.60%	887	99.78%
Jumlah		1369	100%	24	100%	85	100%	371	100	889	100%

Sumber : BTP Jawa Bagian Tengah, 2025

Perlintasan Kereta Api yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 27 perlintasan, terdiri dari 25 perlintasan sebidang dan 2 perlintasan tidak sebidang yaitu di Jalan A. Yani Surakarta (*Underpass*) dan di Jalana Semarang Godong (*Fly Over Ganefo).* Adapun data perlintasan Kereta Api sebidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel II.49. Data Perlintasan Di Ruas Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Jalan / Daerah	LHR	JPL	KM	Kab / Kota	Kelengkapan	Fasilitas Keselamatan	EWS
	Perlintasan Sebidang							
	DAOP 3 Cirebon							
1.	Ketanggungan - Kersana - Bantarsari	1.361	263	264+138	Kab. Brebes	Berpalang Pintu	Faskes : WL, Rambu (2016)	Belum Ada
	DAOP 4 Semarang							
2.	Wiradesa - Kajen	588	115	94+425	Kab. Pekalongan	Berpalang Pintu	Faskes : WL, Rambu (2016)	Belum Ada
3.	Tegowanu - Tanggung - Kapung	738	33	23+025	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : WL, Rambu (2016), Marka (2023)	Ada (2018)
4.	Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts Kab. Semarang	345	39	30+840	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu, (2016)	Ada (2023)
5.	Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts Kab. Semarang	345	27	33+832	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2016)	Ada (2023)
6.	Purwodadi - Geyer / Bts Kab. Semarang	981	81	58+880	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2016) Marka (2023)	Ada (2023)
7.	Purwodadi - Geyer / Bts Kab. Semarang	981	6	006+833	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2020)	Belum Ada

No	Jalan / Daerah	LHR	JPL	KM	Kab / Kota	Kelengkapan	Fasilitas Keselamatan	EWS
8.	Singget / Bts Kab. Grobogan - Doplang - Cepu	641	99	65+202	Kab. Blora	Berpalang Pintu	Faskes : WL, Rambu, LPJU (2017)	Belum Ada
9.	Wirosari - Sulursari - Singget / Bts Kab.Blora	528	72	42+634	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2018), LPJU	Belum Ada
10.	Kuwu - Galeh / Bts Kab. Sragen	383	54	32+897	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu	Faskes : WL & Rambu (2018)	Ada (2019)
	DAOP 5 Purwokerto							
11.	Buntu - Kroya - Slarang	997	409	402+292	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2016)	Belum Ada
12.	Menganti - Kesugihan	811	2	387+325	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu	Faskes : WL dan Rambu (2018), LPJU (2018),	Ada (2018)
13.	Menganti - Kesugihan	811	464	387+966	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu	Faskes : WL dan Rambu (2017) Marka , LPJU (2018)	Ada (2018)
14.	Sidareja - Cukangleuleus	705	441	339+819	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2019)	Belum Ada
15.	Sidareja - Cukangleuleus	705	446	346+950	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu	Perlintasan Baru (Sebelumnya Jalan Kab.)	
16.	Sidareja - Cukangleuleus	705	446 H	353+612	Kab. Cilacap	Tidak Ada Pintu/Palang pintu sederhana	Faskes : Rambu (2024)	Belum Ada
17.	Kutoarjo - Ketawang	970	610	479+174	Kab. Purworejo	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu (2024),WL (2023)	Belum Ada
	DAOP 6 Yogyakarta							
18.	Gemolong / Bts Kab. Grobogan	767	123	80+144	Kab. Sragen	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu, Marka dan WL (2021)	Ada (2023)
19.	Gemolong / Bts Kab. Grobogan	767	138	84+703	Kab. Sragen	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu, Marka dan WL (2021)	Ada (2023)
20.	Gemolong - Andong / Bts Kab. Boyolali	1.024	146	89+038	Kab. Sragen	Berpalang Pintu	Faskes : WL (2024) Rambu (2021) & LPJU	Belum Ada
21.	Sragen - Batujamus / Bts.Kab.Karanganyar	1.311	72	233+038	Kab. Sragen	Berpalang Pintu	Faskes : WL (2024) Rambu (2017) & LPJU	Ada (2023)
22.	Karangwuni / Bts.Prov. Diy	1.144,24	251	130+530	Kab. Klaten	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu, Markadan WL (2021)	Ada (2021)
23.	Lingkar Timur Sukoharjo	848,93	19	14+990	Kab. Sukoharjo	Berpalang Pintu	Faskes : Rambudan Marka (2021) WL (2019)	Ada (2023)
24.	Lingkar Timur Sukoharjo	848,93	9	10+185	Kab. Sukoharjo	Berpalang Pintu	Faskes : Rambu dan	Ada (2022)

No	Jalan / Daerah	LHR	JPL	KM	Kab / Kota	Kelengkapan	Fasilitas Keselamatan	EWS
							Marka (2021 dan WL (2022)	
25.	Palur - Karanganyar	1.939	108	256+761	Kab.Karanganyar	Berpalang Pintu	-	
	Perlintasan Tidak Sebidang							
1	Jl. A. Yani (Surakarta)		-	-	Kota Surakarta	*Underpass*		
2.	Semarang – Godong		15&17	13+257	Kab. Demak	*Fly Over*		

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang di jalan Provinsi akan diupayakan pemenuhan secara bertahap sesuai dengan Perauran Direktur Jenderal Perhubungan Darat No SK. 407/AJ.401/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang dengan Kereta Api

f. Kinerja Ruas Jalan Provinsi

Kinerja Ruas Jalan Provinsi selain ditinjau dari aspek keselamatan lalu lintas juga ditinjau dari aspek kelancaran lalu lintas, berikut gambaran kinerja Ruas Jalan Provinsi berdasarkan V/C rasio :

Sumber : Diolah dari DPUBMCK Prov.Jateng, 2025

Gambar II.11. Kondisi V/C Rasio Ruas Jalan Provinsi Tahun 2024

Pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, pada Tahun 2022 terdapat 23 ruas jalan provinsi yang rawan macet (Tingkat Pelayanan C atau VCR > 0,44). Terjadi perubahan jumlah ruas jalan yang ditangani Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya 168 ruas menjadi 173 ruas jalan, perkembangan penanganan tersebut dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.50. Perkembangan VCR Pada Ruas Jalan Yang Berpotensi Terjadi Kemacetan/Rawan Macet pada Tahun 2023 - 2024

No.	Ruas Jalan	Status	Fungsi	VCR 2022	VCR 2023	2024		
						KAP.	VOL.	VCR
1.	Lingkar Selatan Purwodadi	P	K2	0,67	0,45	4622,80	979	0,21
2.	Semarang - Godong	P	K2	0,65	0,81	3585,09	2270	0,63
3.	Parakan - Patean (Bts. Kab. Kendal)	P	K2	0,6	0,50	2337,72	1070	0,46
4.	Sragen - Batujamus (Bts. Kab. Karanganyar)	P	K2	0,6	0,09	3640,00	867	0,24
5.	Wonogiri - Manyaran - Blimbing	P	K2	0,6	0,23	3152,24	813	0,26
6.	Pati - Tayu	P	K2	0,58	0,16	3520,00	1238	0,35
7.	Boyolali - Klaten	P	K2	0,56	0,42	3576,32	1119	0,31
8.	Kalimanah - Purbalingga	P	K2	0,55	0,38	3635,20	1059	0,29
9.	Ketanggungan - Kersana - Bantarsari	P	K2	0,55	0,34	3386,88	1115	0,33
10.	Randudongkal - Moga	P	K2	0,54	0,53	3203,20	762	0,24
11.	Jl Kol Sugiono (Surakarta)	P	K2	0,52	0,32	3399,94	800	0,24
12.	Jl. Brijend Sudiarto (Semarang)	P	K2	0,5	0.42	7847,84	2424	0,31
13.	Godong - Purwodadi	P	K2	0,49	0,46	3585,09	2270	0,63
14.	Weleri - Patean Bts.Kab.Kendal	P	K2	0,49	0,37	3559,56	1325	0,37
15.	Purwodadi - Wirosari	P	K2	0,48	0,41	3458,00	1148	0,33
16.	Surakarta - Sukoharjo	P	K2	0,47	0,38	4622,80	1691	0,37
17.	Cangkiran - Ungaran (Bts. Kota Semarang)	P	K2	0,46	0,35	3523,52	923	0,26
18.	Kudus - Margoyoso (Bts. Kab. Jepara)	P	K2	0,46	0,43	4058,60	1472	0,36
19.	Temanggung - Pertigaan Bulu	P	K2	0,46	0,37	3387,15	1197	0,35
20.	Karangwuni - Cawas - Jentir	P	K2	0,45	0,43	3266,56	1080	0,33
21.	Wonogiri - Ngadirojo	P	K2	0,45	0,43	4826,00	1567	0,32
22.	Jepara - Keling (Bts. Kab. Pati)	P	K2	0,44	0,36	3386,88	1056	0,31
23	Jatibarang - Ketanggungan	P	K2	0,43	0,32	4419,60	987	0,22

Sumber : Diolah Dari DPUPBMCK Prov. Jateng, 2025

Berdasarkan data Volume Capacity Ratio (VCR) pada ruas jalan Provinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa hampir seluruh ruas jalan mengalami penurunan nilai VCR dari tahun 2022 ke 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 sebagian ruas menunjukkan kecenderungan stabil bahkan mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2024, terdapat beberapa ruas jalan yang masih termasuk kategori rawan macet dengan nilai VCR di atas 0,42 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.51. Indikasi Ruas Jalan Provinsi Yang Berpotensi Terjadi Kemacetan/Rawan Macet pada Tahun 2024

No.	Ruas Jalan	Kab/Kota	Kelas Jalan	KAP.	VOL.	VCR
1.	Semarang-Godong	Kab. Grobogan	II C	3585,09	2270	0,63
2.	Godong - Purwodadi	Kab. Grobogan	II C	3585,09	2270	0,63
3.	Jl. Jendral Gatot Subroto (Purworejo)	Kab. Grobogan	II B	4237,00	1972	0,47
4.	Parakan - Patean / Bts. Kab Kendal	Kab. Temanggung	II C	2337,72	1070	0,46
5.	Magelang - Kaliangkrik / Bts. Kab Wonosobo	Kab. Magelang	II C	2661,12	1223	0,46

Sumber : Diolah Dari DPUBMCK Prov. Jateng, 2025

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelima ruas jalan tersebut memiliki volume lalu lintas yang mendekati kapasitas jalan, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan. Dengan melihat tren pertumbuhan lalu lintas, maka pada tahun 2026 risiko kemacetan diperkirakan masih akan terkonsentrasi pada ruas Godong-Purwodadi dan Semarang–Godong. Hal ini menjadi perhatian strategis dalam perencanaan pembangunan transportasi daerah, mengingat kedua koridor tersebut memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, distribusi logistik, serta pergerakan orang dan barang di Jawa Tengah.

Untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan kemacetan, diperlukan pengoptimalan serta peningkatan pelayanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan, antara lain melalui pengembangan layanan Trans Jateng dan moda angkutan umum lainnya yang terintegrasi. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan peran simpul transportasi, khususnya terminal penumpang tipe B, agar mampu berfungsi optimal sebagai pusat pelayanan, penghubung antarangkutan, serta titik integrasi dengan moda transportasi lainnya. Selain itu, penataan manajemen lalu lintas, penyediaan fasilitas park and ride, serta pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan juga menjadi bagian penting untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong peralihan masyarakat ke angkutan umum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan permasalahan kemacetan dapat ditekan sekaligus mendukung terwujudnya mobilitas perkotaan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

B. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pengampu urusan Pemerintah Daerah Bidang Perhubungan, berikut proporsi sumber daya manusia berdasar status pegawai :

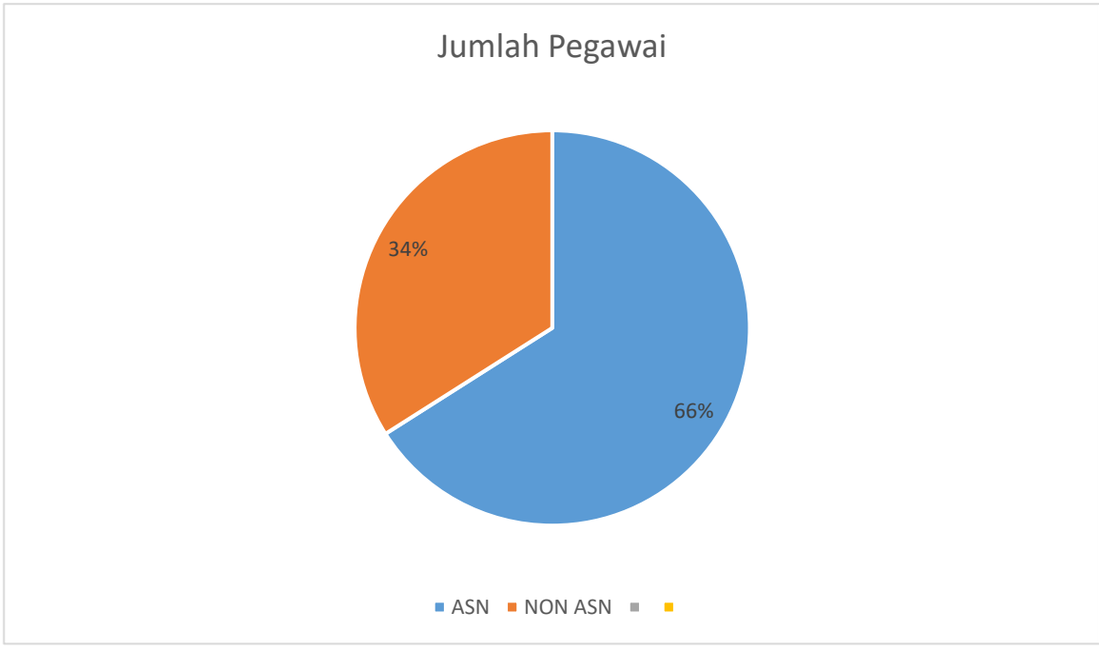

Sumber : http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/, 2024

Gambar II.12. Proporsi Pegawai ASN dan Non ASN Tahun 2024

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah saat ini terdiri dari Aparatur Sipil Negara Negeri Sipil sebanyak 276 (66%) dan Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Harian lepas) sebanyak 141 (34%). Dari seluruh pegawai tersebut masih belum pada kondisi ideal sesuai Analisis Beban Kerja yang sudah di susun, berikut perbandingan ketersediaan pegawai dengan kebutuhan ideal :

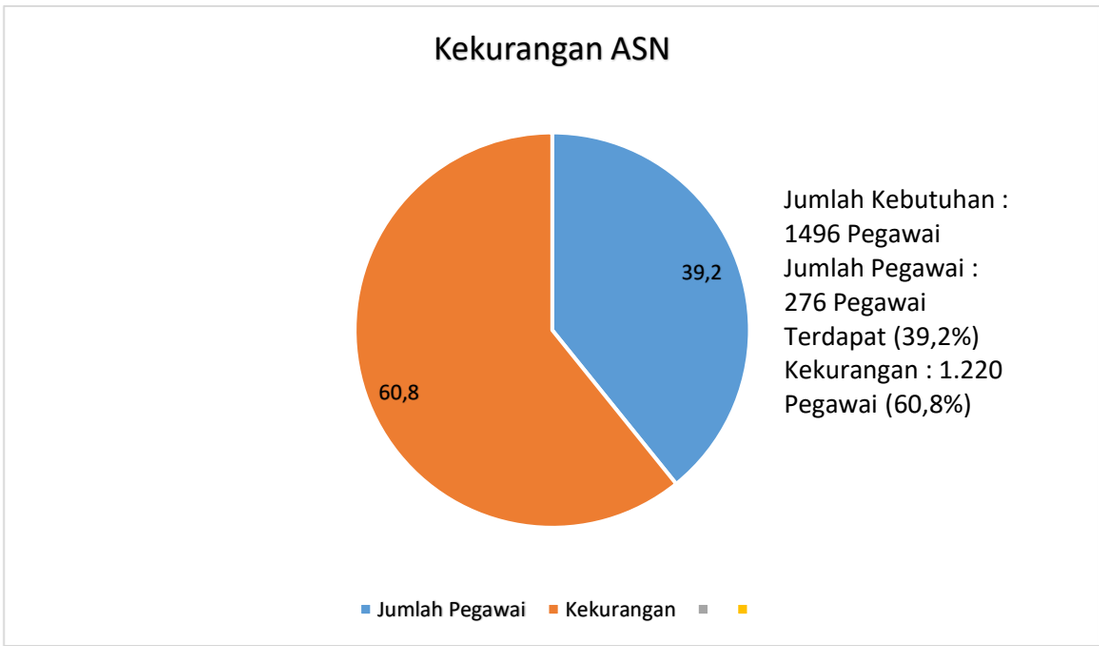

Sumber : http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/, 2024

Gambar II.13. Proporsi Jumlah dan Kebutuhan Pegawai

Sesuai Analisis Beban Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah kondisi ideal membutuhkan 1.496 pegawai, namun kondisi saat ini hanya terdapat 39,2% dari total kebutuhan pegawai yang

terpenuhi (276 ASN dan 141 Non ASN) dimana setiap tahunnya mengalami pengurangan yang diakibatkan purna tugas.

Tabel II.52. Jumlah Pegawai (PNS) Menurut Unit Kerja

No	SUB UNIT	JPT	ES 3	ES 4	PELAKSANA	CPNS	JF	TOTAL
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	3	33	-	6	43
3	Bidang Lalu Lintas Jalan	-	1	-	7	4	4	16
4	Bidang Angkutan jalan	-	1	-	9	1	3	14
5	Bidang Jaringan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	-	1	-	8	2	3	14
6	Bidang Pelayaran	-	1	-	6	-	2	9
7	Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	-	1	3	18	-	2	24
8	Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	-	-	2	16	-	-	18
9	Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	-	1	2	54	-	3	60
10	Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	-	1	2	13	-	2	18
11	Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	-	-	2	16	-	2	20
12	Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	-	1	2	18	-	2	23
13	Balai Transportasi Jawa Tengah	-	1	3	15	-	-	19
	JUMLAH	1	10	19	213	7	29	279

Sumber : http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/, 2024

Data jumlah pegawai berdasarkan unit kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, unit kerja dengan jumlah pegawai paling banyak Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A sebanyak 70 Pegawai dikarenakan balai tersebut mengapu 10 Terminal Penumpang Tipe B.

Tabel II.53. Jumlah Pegawai (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	SD	5	
2	SMP	8	
3	SMA	79	
4	D I	-	
5	D II	-	
6	D III	51	
7	D IV	20	
8	S 1	72	
9	S 2	40	
10	S 3	1	
	Jumlah	276	

Sumber : http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/, 2024

Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, tingkat pendidikan dengan jumlah pegawai paling banyak SMA sebanyak 79 Pegawai utamanya tersebar di Terminal Penumpang Tipe B sebagai Opetaror Terminal dan Juru Pungut Retribusi.

Tabel II.54. Rincian Tenga Teknis

No	Tenaga Teknis	Jumlah
1	Tenaga Teknis Operator Layanan (Petugas Terminal)	36
2	Tenaga Teknis Kebijakan	6
3	Tenaga Pengadministrasi Perkantoran	29
4	Tenaga Pengawas Transportasi Darat	10
5	Tenaga Pengelola Layanan Operasional	7
6	Tenaga Pengolah Data dan Informasi	9
7	Tenaga Penyusun Materi Hukum (Sekretariat)	0
8	Tenaga Petugas Transportasi Darat (Terminal)	1
	Jumlah	98

Sumber : Laporan Tahunan, 2025

C. Kondisi Aset/Modal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Jumlah Asset/Modal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar Rp. 480.099.457.652,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.55. Rincian Aset/Modal Dinas Perhubungan Tahun 2024

No. Urut	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Keterangan
1.	1.3.1.01	Tanah	98	194.148.233.513	
2.	1.3.2.01	Alat Besar	12	1.967.974.500	- Aplikator Marka - Lift - Genset - Pompa Air
3.	1.3.2.02	Alat Angkutan	116	28.507.853.326	
4.	1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	118	1.588.566.200	
5.	1.3.2.04	Alat Pertanian	-	-	
6.	1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.686	8.295.833.944	
7.	1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	139	1.671.830.873	
8.	1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	6	8.150.000	
9.	1.3.2.08	Alat Laboratorium	-	-	
10.	1.3.2.09	Alat Persenjataan	5	3.254.725	
11.	1.3.2.10	Alat Komputer	313	4.595.028.222	
12.	1.3.2.11	Alat Eksplorasi	-	-	
13.	1.3.2.12	Alat Pengeboran	-	-	
14.	1.3.2.13	Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian	-	-	
15.	1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	
16.	1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	-	-	
17.	1.3.2.16	Alat Peraga	-	-	
18.	1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	-	-	
19.	1.3.2.18	Rambu Rambu	1.861	30.502.773.356	
20.	1.3.2.19	Peralatan Olahraga	-	-	
21.	1.3.3.01	Bangunan Gedung	794	136.037.247.668	
22.	1.3.3.02	Monumen	-	-	-
23.	1.3.3.03	Bangunan Menara	1	386.581.815	
24.	1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	6	974.927.508	
25.	1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	26	32.672.423.373	
26.	1.3.4.02	Bangunan Air	13	4.702.597.675	
27.	1.3.4.03	Instalasi	362	10.287.642.897	
28.	1.3.4.04	Jaringan	1.044	20.703.045.136	
29.	1.3.5.01	Buku Perpustakaan	-	-	
30.	1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	16	378.775.000	Alat Musik
31.	1.3.5.03	Hewan	-	-	
32.	1.3.5.04	Biota Perairan	-	-	
33.	1.3.5.05	Tanaman	42	39.465.000	Tanaman di Terminal Drs. Prayitno Magelang

No. Urut	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Keterangan
34.	1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	
35.	1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	
36.	1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15	2.627.252.921	
	Total Aset		6.673	480.099.457.652	

Sumber : Laporan Tahunan, 2025

Dari data tersebut aset/modal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terbesar di jenis aset/modal Tanah sebesar Rp. 480.099.457.652,-.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan perhubungan merupakan urusan daerah wajib bukan pelayanan dasar. Berikut tingkat capaian kinerja pelayanan urusan perhubungan yang diukur sampai dengan Tahun 2024 :

Tabel II.56. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**PERSENTASE PELAYANAN TRANSPORTASI ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH**	%				34,45	42,37	49,87	59,50		30,23	37,08	43,61	58,96		87,75	87,51	87,45	99,09	
A.1	PERSENTASE LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	%				42,12	49,08	54,46	60,38		37,84	43,38	54,98	61,37		89,84	88,39	100,95	101,64	
A.1.1	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%				4,87	5,34	5,49	5,68		4,72	5,14	5,49	5,68		96,92	96,25	100,00	99,98	
A.1.2	Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum	%				82,06	86,00	90,14	94,45		82,53	85,63	124,87	94,45		100,57	99,57	138,53	100,00	
A.1.3	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%				39,56	41,02	42,34	43,21		39,12	41,46	42,77	43,50		98,89	101,07	101,02	100,67	
A.1.4	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%				64,62	65,17	65,96	66,43		64,47	65,88	66,43	66,59		99,77	101,09	100,71	100,24	
A.1.5	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%				23,81	33,33	38,10	42,86		19,05	28,57	28,57	42,86		80,01	85,72	74,99	99,99	
A.1.6	Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	%				21,88	31,25	37,50	43,75		10,94	21,88	28,13	43,75		50,00	70,02	75,01	100,00	
A.1.7	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%				50,15	51,18	52,00	52,51		49,74	51,59	52,41	52,72		99,18	100,80	100,79	100,40	
A.1.8	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%				49,17	50,28	51,20	52,03		48,52	50,28	51,20	52,21		98,68	100,00	100,00	100,35	
A.1.9	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%				78,08	78,53	79,17	79,53		77,81	79,26	79,71	79,89		99,65	100,93	100,68	100,45	
A.1.10	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%				82,49	82,87	83,09	83,55		82,34	83,77	83,92	84,23		99,82	101,09	101,00	100,81	
A.1.11	Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%				40,00	60,00	80,00	100,00		20,00	33,33	60,00	100,00		50,00	55,55	75,00	100,00	
A.1.12	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%				35,82	39,55	41,42	43,28		43,28	47,39	49,25	51,12		120,83	119,82	118,90	118,11	
A.1.13	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%				65,41	73,26	78,39	87,79		59,38	60,67	78,39	87,79		90,78	82,81	100,00	100,01	
A.2	PERSENTASE PEMENUHAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	%				21,22	31,36	41,82	51,45		12,85	21,18	29,19	48,83		60,56	67,54	69,80	94,91	
A.2.1	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%				21,42	29,14	42,85	52,34		16,93	25,06	30,03	35,97		79,04	86,00	70,08	68,73	
A.2.2	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%				20,00	30,00	40,00	50,00		20,00	35,00	40,00	55,00		100,00	116,67	100,00	110,00	
A.2.3	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%				30,77	46,15	61,54	76,92		38,46	53,85	61,54	84,62		124,99	116,68	100,00	110,00	

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.2.4	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%				12,50	18,75	25,00	31,25		12,50	21,88	28,13	37,50		100,00	116,69	112,52	120,00	
A.2.5	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%				25,00	37,50	50,00	62,50		31,25	43,75	50,00	68,75		125,00	116,67	100,00	110,00	
A.2.6	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%				15,38	23,08	30,77	38,46		7,69	19,23	23,08	42,31		50,00	83,32	75,01	110,00	
A.2.7	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%				13,79	20,69	27,59	34,48		13,79	20,69	27,59	41,38		100,00	100,00	100,00	120,01	
A.2.8	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%				13,64	27,27	36,36	45,45		4,55	9,09	17,88	45,45		33,36	33,33	49,17	100,01	
A.2.9	Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%				7,16	10,84	14,63	18,52		3,89	3,89	8,90	12,99		54,33	35,89	60,83	70,15	
A.2.10	Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang	%				37,50	50,00	62,50	75,00		12,50	25,00	37,50	75,00		33,33	50,00	60,00	100,00	
A.3	PERSENTASE OPERASIONAL ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI YANG NYAMAN DAN HANDAL	%				40,00	46,67	53,33	66,67		40,00	46,67	46,67	66,67		100,00	100,00	87,51	100,00	
A.3.1	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%				21,82	31,60	33,55	34,85		27,36	31,92	31,92	36,48		125,39	101,01	95,14	104,68	
B	**NILAI REFORMASI BIROKRASI,93**	Angka				67,73	70,33	72,93	75,50		77,66	78,28				114,66	111,30			
B.1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	Angka				65,00	70,00	75,00	80,00		78,00	79,25	79,75	80,00		120,00	113,21	106,33	100,00	
B.1.1	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.2	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.3	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.4	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.5	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.6	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.7	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.1.8	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
B.2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Angka				70,45	70,65	70,85	71,00		77,31	77,31	78,18	78,18		109,74	109,43	110,35	110,11	
B.2.1	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
A	**INDEKS PELAYANAN TRANSPORTASI**									6,06					6,053					99,88

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.1	RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI DALAM 1 JUTA KEBERANGKATAN									16,07					16,098					100,17
A.1.1	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A									0,87					0,83					96,55
A.1.2	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B									0,87					0,83					96,55
A.1.3	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A									0,86					0,82					97,67
A.1.4	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A									0,87					0,83					96,55
A.1.5	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A									0,87					0,82					96,55
A.1.6	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B									0,87					0,82					96,55
A.1.7	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A									0,93					0,98					102,15
A.1.8	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B									0,92					0,97					102,17
A.1.9	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A									0,93					0,97					102,15
A.1.10	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A									0,92					0,97					102,17
A.1.11	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A									0,92					0,97					103,26
A.1.12	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B									0,93					0,98					102,15
A.1.13	Rasio kendaraan laik jalan di jawa tengah									0,988					0,99					99,70
A.1.14	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan									0,59					0,38					88,14
A.1.15	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai									0,6					0,20					66,67
A.1.16	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan									0,36					0,04					66,67
A.2	RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI									0,38					0,38					100
A.2.1	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis									0,55					0,50					94,55
A.2.2	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A									0,22					0,22					95,45

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.2.3	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B									0,03					0,01					66,67
A.2.4	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A									0,26					0,26					96,15
A.2.5	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A									0,25					0,25					96,00
A.2.6	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A									0,23					0,21					95,65
A.2.7	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B									0,19					0,17					94,74
A.2.8	Rasio konektivitas perkotaan									0,532					0,51					97,56
A.2.9	Rasio pemanfatan terminal									0,24					0,22					95,42
A.2.10	Rasio trayek angkutan jalan									0,58					0,51					96,55
A.2.11	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP									0,45					0,33					84,44
A.3	ON TIME PERFORMANCE LAYANAN TRANSPORTASI									83,21					83,22					100,01
A.3.1	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum									69,36					65,45					97,09
A.3.2	Persentase Perpindahan moda angkutan umum									55					52,22					96,36
B	**INDEKS REFORMASI BIROKRASI (PERANGKAT DAERAH)**									78,28					78,82					100
B.1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT									80,25					80,25					100
B.1.1	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)									100					100					100
B.1.2	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)									100					100					100
B.1.3	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)									100					100					100
B.1.4	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)									100					100					100
B.1.5	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)									100					100					100
B.1.6	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola									100					100					100

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)																			
B.1.7	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)									100					100					100
B.1.8	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)									100					100					100
B.1.9	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah									100					100					100

Sumber : Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2024

Interpretasi capaian kinerja pelayanan terhadap kondisi akhir dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024, sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Pelayanan Dengan Status Tercapai

1. Capaian kinerja indikator tujuan

   Tingkat capaian indikator tujuan nilai reformasi birokrasi sampai dengan 2024 terhadap akhir renstra sebesar 100% dikarenakan adanya peningkatan kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan Tahun 2024 sebesar 80,25 dari target 80,25. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan pada unit pelayanan BRT Trans Jateng, Terminal Penumpang Tipe B dan Penerbitan KP/KJP dalam hal peningkatan Terminal Penumpang Tipe B dan peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan seperti pelatihan *crew* tranjateng terkait sensitifitas terhadap pengguna layanan.

2. Capaian kinerja indikator sasaran

   a. Nilai Kepuasan Masyarakat

      Indikator Nilai kepuasan masyarakat diperkirakan tercapai karena sesuai dengan progres nilai IKM tahun sebelumnya selalu meningkat dimana IKM pada tahun 2024 sebesar 80,25 dari target 80,25 sementara target akhir renstra adalah sebesar 80. Hal yang dapat mendorong peningkatan IKM pada tahun 2024 diantaranya Pembangunan Terminal Kutoarjo dengan fasilitas UMKM, Peningkatan Terminal Purwodadi, serta rehabilitasi Terminal Penggaron dengan fasilitas Pojok Baca selain itu terdapat Pembangunan Halte Trans Jateng sebanyak 6 Unit dengan fasilitas ramah disabilitas.

   b. Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan

      Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan didukung oleh 16 Indikator Program yaitu Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan 1-VI, Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan I-VI, Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah dan Prasarana Perhubungan Wilayah I-VI, Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai dan Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan.

   c. Rasio konektivitas provinsi

      Rasio konektivitas provinsi di dukung oleh 11 Indikator Program yaitu Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan I-VI, Rasio Implementasi Simpul dan jaringan transportasi strategis, rasio konektivitas perkotaan, rasio pemanfaatan terminal, rasio trayek angkutan jalan, serta rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP.

d. On time performance layanan transportasi

Tercapainya Indikator On time performance mencapai angka 100,01, hal yang dapat menunjang tercapai nya indicator tersebut antara lain karena meningkatnya moda shifting yaitu perpindahan orang yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan angkutan umum masal Trans Jateng.

3. Capaian kinerja indikator program

Indikator program pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang tingkat capaian sampai dengan Tahun 2020 dalam kategori tercapai :

a. Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada Kantor Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I sampai dengan VI dan Balai Transportasi Jawa Tengah

Tingkat capaian indikator program Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada Kantor Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I sampai dengan VI dan Balai Transportasi Jawa Tengah sebesar 100,00% dikarenakan semua aktivitas yang bersifat administrasi dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD

Tingkat capaian indikator program ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD sebesar 100,00% dikarenakan semua aktivitas yang bersifat administrasi dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

c. Rasio hasil rekomendasi ramp check (6 Indikator pada masing Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah)

Realisasi Indikator pada tahun 2024 adalah sebagai berikut : Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A tercapai 0,82 % dari target 0,86 % dengan tingkat capaian 97,67 % sementara target akhir renstra adalah 0,86 % dan diperkirakan tercapai, Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B tercapai 0,83 % dari target 0,87 % dengan tingkat capaian 96,55 % sementara target akhir renstra adalah 0,87 % dan diperkirakan tercapai, Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A tercapai 0,83 % dari target 0,87 % dengan tingkat capaian 96,55 % sementara target akhir renstra adalah 0,87 % dan diperkirakan tercapai, Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A tercapai 0,82 % dari target 0,87 % dengan tingkat capaian 96,55 % sementara target akhir renstra adalah

0,87 % dan diperkirakan tercapai, Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B tercapai 0,82 % dari target 0,87 % dengan tingkat capaian 96,55 % sementara target akhir renstra adalah 0,87 % diperkirakan tercapai dan Rasio hasil rekomendasi ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A tercapai 0,82 % dari target 0,87 % dengan tingkat capaian 96,55 %;

d. Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani

   Realisasi Indikator pada tahun 2024 Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A tercapai 0,98 % dari target renstra 0,93 % dengan tingkat capaian 102,15 %. Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B tercapai 0,97 % dari target renstra 0,92 % dengan tingkat capaian 102,17 %, Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A tercapai 0,98 % dari target renstra 0,93 % dengan tingkat capaian 102,15 %, Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A tercapai 0,97 % dari target renstra 0,92 % dengan tingkat capaian 102,17 %, Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B tercapai 0,98 % dari target renstra 0,93 % dengan tingkat capaian 102,15 %, Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A tercapai 0,97 % dari target renstra 0,92 % dengan tingkat capaian 103,26 %. Tingkat capaian Rasio Kejadian Kecelakaan yang tertangani rata2 diatas 100% hal ini dikarenakan penanganan Daerah Rawan Kecelakaan di ruas jalan provinsi pada tahun 2024.

e. Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP

   Realisasi Indikator pada tahun 2024 Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP tercapai 0,33 % dari target 0,45 % dengan tingkat capaian 84,44 ;

f. Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis

   Realisasi Indikator pada tahun 2024 Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis tercapai 0,50 % dari target 0,55 % dengan tingkat capaian 94,55 %.

g. Rasio konektivitas perkotaan;

Realisasi Indikator pada tahun 2022 Rasio konektivitas perkotaan tercapai 0,51 % dari target 0,532 % dengan tingkat capaian 97,56 %. Tingkat capaian pada tahun 2024 dikarenakan terdapat kajian angkutan aglomerasi di wilayah pengembangan petanglong serta penambahan jumlah armada untu Rute Semarang-Kendal-Weleri sebanyak 2 unit dan Surakarta Wonogiri sebanyak 1 Unit;

h. Rasio pemanfatan terminal

Realisasi Indikator pada tahun 2024 Rasio pemanfatan terminal tercapai 0,22% dari target 0,24 % dengan tingkat capaian 95,42 %.

i. Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum

Realisasi Indikator pada tahun 2024 Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum tercapai 65,45 % dari target 63,36 % diperkirakan tercapai/melebihi karena adanya program mudik grtais yang diadakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta berbagai instansi baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta dan BUMN;

j. Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan

Realisasi Indikator pada tahun 2024 Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan tercapai 0,04 % dari target 0,36 % dengan tingkat capaian 66,67 % target akhir renstra diperkirakan tercapai karena adanya pemenuhan perlengkapan jalan pada perlintasan sebidamg sesuai dengan standart pemenuhan perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang;

k. Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai

Realisasi Indikator pada tahun 2024 Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan tercapai 0,20 % dari target 0,6 % dengan tingkat capaian 66,67 % sementara target akhir renstra diperkirakan tercapai karena adanya penyediaan sarana prasarana penyeberangan seperti life jacket dan rambu dermaga sungai.

Tabel II.57. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp. 000)					Anggaran pada Tahun (Rp. 000)					Realsisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENDAPATAN	-	-	-	-		8.570.479	13.831.164	22.321.786	26.400.000	27.000.00	11.863.807	14.612.292	26.898.579	26.400.000	36.928.928
Retribusi Daerah						3.819.085	2.308.620	3.521.786	5.400.000	2.162.150	3.141.613	1.995.094	4.419.443	5.400.000	4.440.420
Lain-Lain PAD yang Sah						4.751.394	11.522.544	18.800.000	21.000.000	24.837.850	8.722.194	12.617.198	22.479.136	21.000.000	32.488.508
BELANJA	318.569.963	307.679.528	300.737.886	309.410.034	250.243.346	94.761.827	204.112.865	170.418.443	200.605.355	193.075.157	90.122.465	194.619.417	167.478.842	196.666.609	189.906.926
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	272.428.026	251.800.309	228.442.758	241.882.204	172.333.238	74.549.162	141.868.874	109.379.027	133.915.258	129.071.703	71.222.940	135.407.122	108.113.208	132.067.125	127.806.638
Pengelolaan Pelayaran	5.029.000	13.806.000	29.933.000	23.860.000	1.704.100	1.523.263	1.537.733	1.936.216	2.586.116	459.100	1.476.760	1.306.923	1.627.573	2.412.386	423.541
Pengelolaan Perkeretaapian	3.809.000	4.409.000	3.809.000	3.909.000	3.137.583	1.706.272	1.842.000	1.665.024	3.254.940	1.268.866	1.660.510	1.802.048	1.652.693	3.240.744	1.262.848
Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	37.303.937	37.664.219	38.553.128	39.758.830	73.068.425	16.983.130	58.864.258	57.438.176	60.849.041	62.275.488	15.762.255	56.103.324	56.085.367	58.946.354	60.413.896

Sumber : Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Tabel II.58. Rasio Realsisasi Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Uraian **)	Rasio Realsisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN	138,43	105,65	120,50	100,00	136,77	13,65	13,57
Retribusi Daerah	82,26	86,42	125,49	100,00	205,37	(15,33)	5,85
Lain-Lain PAD yang Sah	183,57	109,50	119,57	100,00	130,80	16,17	14,63
BELANJA	95,10	95,35	98,28	98,04	98,36	10,18	10,51
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	95,54	95,45	98,84	98,62	99,02	8,45	8,85
Pengelolaan Pelayaran	96,95	84,99	84,06	93,28	92,25	(46,36)	(49,73)
Pengelolaan Perkeretaapian	97,32	97,83	99,26	99,56	99,53	(6,89)	(6,30)
Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	92,81	95,31	97,64	96,87	97,01	14,55	14,78

Sumber : Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dikatakan baik pada Tahun 2024 dengan rasio 98,36% dengan rincian pada Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2024 sebesar 99,02%, Program Pengelolaan Pelayaran pada Tahun 2024 sebesar 92,25%, Program Pengelolaan Perkeretaapian pada Tahun 2024 sebesar 99,53%, Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2024 sebesar 97,01%. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan tersebut karena prosedur/mekanisme pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perhubungan berjalan dengan baik, jumlah personil serta kualitas personil yang cukup dengan adanya personil Non PNS yang sesuai dengan kebutuhan serta kompetensi sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, selain itu progress pelaksanaan keempat program tersebut pada Tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan dikatakan kurang baik pada Tahun 2020 pada Tahun 2020 dengan rasio 95,10% dengan rincian pada Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2022 sebesar 95,54%, Program Pengelolaan Pelayaran pada Tahun 2022 sebesar 96,95%, Program Pengelolaan Perkeretaapian pada Tahun 2022 sebesar 97,32%, Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022 sebesar 92,81%. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan tersebut dikarenakan anggaran pada Tahun 2020 dialihkan untuk mendukung penanganan darurat pandemi Covid-19 di Jawa Tengah, salah satu kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan yaitu pelaksanaan posko pengendalian di pintu masuk Jawa Tengah pada 17 lokasi di perbatasan Jawa Tengah dan implementasi Bus Sehat Trans Jateng. Dengan demikian berimplikasi terhadap target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada Bab II, berikut Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi Internal maupun Eksternal dan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.59.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah di Jawa Tengah		
		Masih Kurangnya jaringan trayek angkutan jalan	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Masih rendahnya jumlah total angkutan taksi berijin
			Masih kurangnya jumlah total angkutan barang berijin
			Masih kurangnya Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin
			Belum Optimalnya Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif
			Masih rendahnya jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan
			Belum semuanya Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		Belum sepenuhnya jumlah penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru yang menggunakan angkutan umum	
			Belum sepenuhnya penumpang angkutan umum yang terlayani
		Masih rendahnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B	
			Belum semua Terminal Tipe B sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
		Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	
			Masih kurangnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ
		Masih kurangnya jumlah pengunjung terminal tipe B	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Belum semua terminal Tipe B dalam kondisi baik
		Belum optimalnya Jumlah Penduduk yang Terlayani Trans Jateng	
			Masih kurangnya Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) yang Terpenuhi
			Belum optimalnya jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan
		Masih kurangnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	
			Belum sepenuhnya dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya
			Masih rendahnya Fasilitas Pelabuhan SDP yang terpenuhi
			Masih rendahnya perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi
			Masih rendahnya Berth occupancy ratio
2	Masih tingginya kecelakaan perjalanan transportasi		
		Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	
			Belum optimalnya penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
			Masih rendahnya jumlah rekomendasi hasil Forum LLAJ

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Masih kurangnya kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin dibandingkan dengan jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan
			Masih kurangnya pemenuhan perlengkapan jalan terpasang
		Masih terjadi kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang belum tertangani	
			Masih rendahnya rehabilitasi DRK
		Belum sepenuhnya kendaraan laik jalan di jawa tengah	
			Belum sepenuhnya Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah
		Belum sepenuhnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti	
			Belum sepenuhnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check
		Masih rendahnya perlintasan sebidang yang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar	
			Masih rendahnya perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan
3	Belum optimalnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan kualitas pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimalnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	
			Belum optimalnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah
			Belum optimalnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
			Belum optimalnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
			Belum optimalnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah
			Belum optimalnya milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset
			Belum optimalnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah
			Belum optimalnya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
4	Belum optimalnya pengelolaan risiko pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		
		Kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah belum optimal	
			Kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah belum optimal

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Berbagai kondisi *Internal* dan *Eksternal* yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi *eksternal*

tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah meliputi :

Tantangan dan peluang yang dihadapi baik dalam kondisi internal maupun eksternal dalam perhubungan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, dan perkeretaapian sebagai berikut.

Tabel II.60. Analisa SWOT Sektor Perhubungan Darat

	Strengths (Kekuatan)	**Weaknesses (Kelemahan)**
Kondisi Internal	1) Adanya payung hukum yang kuat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, penyelenggaraan angkutan sewa khusus di wilayah operasi dalam Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2018 terkait jasa transportasi online/daring), sistem manajemen informasi yang terintegrasi, rencana tata ruang, dan peraturan lain yang terkait; 2) Tersedianya layanan transportasi umum aglomerasi perkotaan (Bus Trans Jateng) dengan tarif terjangkau; 3) Fasilitas keselamatan menjadi salah satu prioritas dalam agenda rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 4) Pemenuhan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang sesuai dengan standar menjadi prioritas dalam renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan terhadap jalur-jalur distribusi 5) Petugas JPL sudah memenuhi persyaratan tentang standar kompetensi	1) Aksesibilitas antarwilayah belum merata, terutama di daerah selatan dan pegunungan dengan wilayah utara; 2) Rencana pembangunan jalan lingkar dan jalan tol dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya terealisasi; 3) Terminal Tipe B belum optimal; banyak bus AKDP dan AKAP tidak masuk terminal; 4) Konektivitas antara angkutan umum dan angkutan lanjutan dari/ke terminal dan stasiun belum terhubung sempurna; 5) Ketersediaan SDM di terminal Tipe B masih terbatas. 6) Masih adanya perlintasan sebidang yang belum terpenuhi prasarana yang standar (JPL 446H Cilacap palang pintu belum standar) 7) Terjadinya kerusakan peralatan penunjang keselamatan secara mendadak 8) Masih terdapat petugas PJL yang belum diklat dan tidak memiliki sertifikasi
	Opportunities (Peluang)	**Threats (Ancaman)**
Kondisi Eksternal	1) Pengembangan kawasan aglomerasi dan adanya penetapan kawasan pariwisata nasional dan kawasan industri; 2) Keberadaan layanan transportasi massal perkotaan yang berperan sebagai feeder; 3) Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe B) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 4) Dukungan agenda SDGs 2030 untuk transportasi berkelanjutan, ramah lingkungan, dan inklusif. 5) Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang handal, nyaman, aman dan terjangkau dalam meningkatkan	1) Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor; 2) Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi; 3) Tuntutan kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi; 4) Terminal belum mengakomodir UMKM. 5) Tingkat kerawanan kecelakaan pada perlintasan sebidang masih relatif sering terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan keselamatan serta pemahaman terkait dengan petunjuk rambu lalu lintas pada perlintasan sebidang

	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
	kinerja pelayanan jasa transportasi; 6) Tingkat kepuasaan masyarakat terhadap layanan angkutan aglomerasi Trans Jateng yang meningkat. 7) Pengadaan penyegaran atau bimtek yang diadakan Direktorat Keselamatan DJKA dan DAOP 6 Yogyakarta PT KAI untuk peningkatan kompetensi para petugas PJL	

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Tantangan dan peluang yang dihadapi baik dalam kondisi internal maupun eksternal di sektor Perhubungan Laut baik ASDP maupun laut sebagai berikut.

Tabel II.61. Analisa SWOT Sektor Perhubungan Laut

	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Kondisi Internal	1) Adanya payung hukum yang kuat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan peraturan terkait pengembangan di bidang pelayaran; 2) Angkutan laut banyak menarik wisatawan baik dalam dan luar negeri; 3) Angka perizinan angkutan laut telah memenuhi target. 4) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan efektif untuk membantu masyarakat mempersingkat waktu dan jarak tempuh	1) Sarana dan prasarana untuk mendukung aksesibilitas bagi penyandang berkebutuhan khusus belum merata dan sesuai dengan peraturan yang telah ada; 2) Konektivitas antara angkutan umum atau angkutan lanjutan dari/ke Pelabuhan; 3) Lokasi Pelabuhan dan Dermaga jauh dari lokasi perhentian angkutan umum; 4) Pelabuhan Pengumpan Regional yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya beroperasi rutin; 5) Keterbatasan Pelabuhan Perikanan untuk memiliki syahbandar. Hanya 5 pelabuhan dari 11 pelabuhan yang memiliki syahbandar; 6) Keterbatasan SDM pelabuhan perikanan dan kurangnya pelatihan nahkoda. 7) Sarana dan prasarana angkutan Sungai, danau dan penyeberangan belum terfasilitasi sesuai ketentuan; 8) Pelayanan short cut sehingga Masyarakat pengguna penyeberangan merasa tidak perlu menggunakan life jacket sebagai alat keselamatan
	Opportunities (Peluang)	**Threats (Ancaman)**
Kondisi Eksternal	1) Keberadaan layanan transportasi massal perkotaan yang dapat berperan sebagai feeder dari lokasi Pelabuhan ataupun dermaga; 2) Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe B) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 3) Tingkat kepuasaan masyarakat terhadap layanan angkutan aglomerasi Trans Jateng yang meningkat;	1) Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi; 2) Tuntutan kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi; 3) Angkutan sungai mempersingkat waktu dan jarak tempuh bagi Masyarakat pengguna penye berangan; 4) Angkutan sungai mempersingkat waktu dan jarak tempuh bagi Masyarakat pengguna penye berangan; 5) Angkutan sungai mempersingkat waktu dan jarak tempuh bagi

Strengths (Kekuatan)		Weaknesses (Kelemahan)
	4) Keberadaan angkutan sungai/danau yang ditunjukkan untuk pariwisata dapat berperan sebagai simpul transportasi. 5) Angkutan sungai mempersingkat waktu dan jarak tempuh bagi Masyarakat pengguna penye berangan; 6) Angkutan sungai mempersingkat waktu dan jarak tempuh bagi Masyarakat pengguna penyeberangan;	Masyarakat pengguna penye berangan;

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Tantangan dan peluang yang dihadapi baik dalam kondisi internal maupun eksternal di sektor Perhubungan Udara akan dibahas lebih fokus terhadap konektivitas dan simpul transportasi antara setiap transportasi dengan bandara yang berada di Provinsi Jawa Tengah

Tabel II.62. Analisa SWOT Sektor Perhubungan Udara

Strengths (Kekuatan)		Weaknesses (Kelemahan)
Kondisi Internal	1) Adanya payung hukum yang kuat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 2) Kereta bandara dan layanan BRT telah beroperasi di beberapa bandara di Provinsi Jawa Tengah 3) Diterbitkannya SK Kemenhub No 37 Tahun 2025 tentang status Bandar Udara Internasional (Bandar udara Internasional Adi Soemarmo dan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani) 4) Daya tarik wisata laut 5) UPBU dan Cab Angkasa Pura sebagai operator bandara	1) Sarana dan prasarana untuk mendukung aksesibilitas bagi penyandang berkebutuhan khusus belum merata dan sesuai dengan peraturan yang telah ada; 2) Konektivitas antara angkutan umum dan angkutan lanjutan dari/ke lokasi bandara belum terhubung semua. 3) Bandara Ngloram, Bandara JB Sudirman dan Bandara Dewandaru pada saat ini belum terdapat layanan penerbangan reguler
Opportunities (Peluang)		**Threats (Ancaman)**
Kondisi Eksternal	1) Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe B) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 2) Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang handal, nyaman, aman dan terjangkau dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi. 3) Penerbangan perintis serta potensi joy flight	1) Tuntutan kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi. 2) Fluktuasi nilai tukar rupiah serta penurunan jumlah operasional pesawat

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Berdasarkan Analisis SWOT dalam melihat *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan Threats (Ancaman) telah disusun beberapa strategi sebagai berikut :

Tabel II.63. Strategi dari Analisa SWOT

Perhubungan Darat

Strategi S-O	**Strategi S-T**
"Strength" untuk manfaatkan "Opportunity"	**"Strength" untuk mengatasi "Threats"**
1) Mengoptimalkan potensi Terminal Tipe B sebagai simpul konektivitas dengan dukungan regulasi dan digitalisasi layanan.; 2) Mengembangkan angkutan umum aglomerasi perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas Kawasan industri dan pariwisata.	1) Memfasilitasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengkuti kegiatan peningkatan keselamatan lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah pusat; 2) Melibatkan instansi terkait dalam peningkatan pembinaan dan pemahaman penyedia layanan transportasi untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Jawa Tengah.
Strategi W-O	**Strategi W-T**
Tanggulangi "Weaknesses" untuk manfaatkan "Opportunities"	**Tanggulangi "Weaknesses" untuk mengatasi "Threats"**
1) Menyediakan, meningkatkan dan mempertahankan kinerja sarana prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis wilayah di Jawa Tengah; 2) Meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan terminal untuk menarik pengguna angkutan umum.	1) Melengkapi fasilitas keselamatan pada Daerah Rawan Kecelakaan Jawa Tengah; 2) Memfasilitasi pembangunan simpul dan atau layanan transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Jawa Tengah;

Perhubungan Laut

Strategi S-O	**Strategi S-T**
"Strength" untuk manfaatkan "Opportunity"	**"Strength" untuk mengatasi "Threats"**
1) Mengembangkan Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Kendal sebagai pintu gerbang logistik Jawa Tengah. 2) Memanfaatkan posisi strategis pelabuhan regional untuk mendukung ekspor-impor dan pariwisata bahari.	1) Koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Tengah; 2) Mendorong Penguatan tata kelola operasional untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan di pelabuhan (pendangkalan, sedimentasi).
Strategi W-O	**Strategi W-T**
Tanggulangi "Weaknesses" untuk manfaatkan "Opportunities"	**Tanggulangi "Weaknesses" untuk mengatasi "Threats"**
1). Mendorong Perbaikan fasilitas bongkar muat serta digitalisasi layanan pelabuhan untuk mendukung efisiensi logistik.	1) Mendorong Penanganan pendangkalan dan keterbatasan kapasitas pelabuhan sebagai prioritas agar tidak kehilangan daya saing.

Perhubungan Udara

Strategi S-O	**Strategi S-T**
"Strength" untuk manfaatkan "Opportunity"	**"Strength" untuk mengatasi "Threats"**
1) Mengoptimalkan status Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo sebagai bandara internasional untuk mendorong pariwisata dan investasi. 2) Menarik maskapai baru melalui insentif dan promosi potensi pasar Jawa Tengah. 3) Mengembangkan layanan kargo udara untuk mendukung sektor perdagangan ekspor.	1) Memperkuat koordinasi dengan Angkasa Pura dalam menjaga daya saing dan keandalan layanan.
Strategi W-O	**Strategi W-T**
Tanggulangi "Weaknesses" untuk manfaatkan "Opportunities"	**Tanggulangi "Weaknesses" untuk mengatasi "Threats"**
1) Mengatasi keterbatasan fasilitas bandara melalui modernisasi infrastruktur dan kerja sama investasi.	1) Mendorong Rehabilitasi sarana dan prasarana bandara yang belum optimal agar tidak kalah bersaing dengan bandara sekitarnya.

Strategi S-O	Strategi S-T
2) Meningkatkan konektivitas multimoda (bandara–jalan tol–kereta) untuk memperluas catchment area	2) Peningkatan kualitas layanan dan efisiensi operasional untuk menghadapi potensi penurunan minat maskapai.

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Telaahan Renstra K/L

Didasarkan pada tema visi Indonesia emas 2045, yakni untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, maka untuk mendukung Visi Presiden menuju Inonesia Emas 2045 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, Visi Kementerian Perhubungan "Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045". Dalam mendukung visi tersebut Kementrian Perhubungan berpedoman pada 8 Asta Cita serta 17 Arah Pembangunan Nasional.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Perhubungan mempunya 8 misi, yaitu :

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi thdp ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi kewilayahandan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tujuan merupakan pernyataan tetang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Adapun tujuan pembangunan sektor perhubungan 2025-2029, sebagai berikut :

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional RPJMN 2025-2029;
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas;
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif;

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis sebagai berikut :

1. Menurunnya Emisi GRK Transportasi;
2. Meningkatnya Stok Infrastruktur Transportasi;

3. Menurunnya Biaya Transportasi Logistik;
4. Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;
5. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional;
6. Meningkatnya keselamatan transportasi nasional;
7. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi nasional;
8. Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten;
9. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kemenhub.

Tabel II.64. Persandingan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Renstra Kemenhub 2025-2029			Renstra Dinas Perhubungan Provinsi 2025-2029			Keterangan
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Tujuan/Sasaran Dinas Perhubungan	Indikator	Target	
			Tujuan Meningkatkan Kualitas layanan transportasi di Jawa Tengah	Indeks Pelayanan Transportasi	2025 : 6,660 2026 : 6,788 2027 : 6,904 2028 : 7,019 2029 : 7,126 2030 : 7,242	Indikator Tambahan
Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi transportasi Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	2025 : 0,651 2026 : 0,660 2027 : 0,670 2028 : 0,690 2029 : 0,700	Sasaran : Meningkatnya konektivitas provinsi	Rasio konektivitas provinsi	2025 : 0,274 2026 : 0,302 2027 : 0,327 2028 : 0,352 2029 : 0,375 2030 : 0,401	Sesuai
	Tingkat Integrasi Jaringan transportasi Nasional	2025 : 67,50 2026 : 70,00 2027 : 72,25 2028 : 75,00 2029 : 77,75	-	-	-	Tidak digunakan
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional	2025 : 99,9999 2026 : 99,9999 2027 : 99,9999 2028 : 99,9999 2029 : 99,9999	Sasaran Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	2025 : 99,9836 2026 : 99,9838 2027 : 99,9842 2028 : 99,9846 2029 : 99,9850 2030 : 99,9853	Sesuai
Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi	Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	2025 : 72 2026 : 74 2027 : 77 2028 : 80 2029 : 83				Tidak digunakan
Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten	Indeks Peningkatan SDM transportasi	2025 : 88; 2026 : 89; 2027 : 90 2028 : 91; 2029 : 92				Tidak digunakan
Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik di Kementrian Perhubungan	Indeks RB Kementrian Perhubungan	2025 : 86,00 2026 : 87,00 2027 : 88,00 2028 : 89,00 2029 : 90,00	**Tujuan** Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	2025 : 85,12 2026 : 85,15 2027 : 85,20 2028 : 85,25 2029 : 85,30 2030 : 85,35	Sesuai
			Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	2025 : 3,07 2026 : 3,11 2027 : 3,15 2028 : 3,19 2029 : 3,23 2030 : 3,30	Indikator Tambahan

Renstra Kemenhub 2025-2029			Renstra Dinas Perhubungan Provinsi 2025-2029			Keterangan
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Tujuan/Sasaran Dinas Perhubungan	Indikator	Target	
Meningkatkan Kinerja pelayanan transportasi nasional	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi nasional	2025 : >88,31 2026 : >88,31 2027 : >88,31 2028 : >88,31 2029 : >88,31	Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	2025 : 81,55 2026 : 81,60 2027 : 81,65 2028 : 81,70 2029 : 81,75 2030 : 81,80	Sesuai

Sumber : Renstra Kemenhub 2025-2029

Selain itu untuk sektor transportasi dalam RPJMN, *Major Project* yang berada di Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Semarang melalui Pembangunan BRT dan peningkatan kereta komuter;
2. Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya;
3. Pengembangan Pelabuhan New Tanjung Mas dan Kendal Seaport;
4. Pengambangan KIT Batang, termasuk infrastruktur pendukungnya seperti jalan, system penyediaan air baku dan air minum, tele komunikasi, *dry port*, pelabuhan, dsb
5. Pengembangan Pelabuhan Cilacap
6. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui : penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih danbibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitihasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani ; peningkatan kualitas pasca panen melalui peningkatan prasarana pascapanen.

Tabel II.65. Telaahan Renstra K/L

NO	SASARAN STRATEGIS K/L	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
1	Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi transportasi Nasional	1. Diperlukan reaktivasi jalur rel KA non aktif, diantaranya: Semarang-Kudus-Rembang - Bojonegoro, Semarang-Magelang (Borobudur)-Yogyakarta, Purwokerto-Wonosobo; 2. Diperlukan perpanjangan layanan dan elektrifikasi KA pramex dari Stasiu Tugu Yogyakarta-Stasiun Kutoarjo Purworejo	PENGHAMBAT : 1. Ketersediaan lahan untuk reaktivasi jalur Kereta Api karena jalur eksisting Sebagian besar sudah dimanfaatkan oleh masyarakat; 2. Adanya konflik pembebasan lahan untuk pembangunan akses kereta api; 3. Sarana Prasarana perpanjangan rute kebumen saat ini belum siap; 4. Belum ada blue print Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) di Provinsi Jawa Tengah

NO	SASARAN STRATEGIS K/L	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
		diperpanjang ke Kebumen dan KA Kedungsepur dari Stasiun Ngrombo Grobogan-Stasiun Poncol Kota Semarang di perpanjang ke Stasiun Weleri Kab Kendal; 3. Diperlukan pembangunan double track rel kereta api diantaranya pada jalur Kroya-Batas Cilacap 4. Jaringan Rel KA yang sudah terbangun yang terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Emas perlu dioptimalisasi. 5. Diperlukan peningkatan frekuensi kereta api barang/logistik dalam mendukung penumpu pangan dan industri nasional 6. Jembatan timbang belum sepenuhnya ter optimalisasi untuk menyediakan data pendukung logistic pangan Jawa Tengah 7. Diperlukan bantuan fasilitas penyusunan Sistem Logistik Daerah dalam mendukung kebijakan Nasional Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri Nasional	PENDORONG : 1. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan transportasi berbasis rel; 2. Daya Tarik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara terhadap KSPN Borobudur; 3. Ditetapkannya Kabupaten Rembang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) promosi; 4. Integrasi KSPN Borobodur-Dieng sebagai daya Tarik pariwisata; 5. Lokasi Bandara Adi Soemarmo yang strategis pasca pembangunan Bandara YIA di Yogyakarta.
2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	1. Diperlukan layanan angkutan umum massal perkotaan lintas provinsi Surakarta-Klaten-Prambanan-Yogyakarta; 2. Diperlukan peningkatan integrasi antar moda transportasi di	PENGHAMBAT : 1. Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 10 Wilayah Pengembangan, sampai saat ini baru 4 Wilayah Pengembangan yang terlayani angkutan umum masal, masih perlu pemerataan di berbagai WP terkait dengan

NO	SASARAN STRATEGIS K/L	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
		Terminal Tipe A, Stasiun, Bandara ,dan Pelabuhan	pengembangan angkutan umum masal; 2. Pada saat ini Tingkat kunjungan ke Terminal baik itu Terminal Tipe A maupun Terminal Tipe B masih terglong rendah. PENDORONG : 1. Sudah adanya angkutan umum berbasis rel (KRL) pada wilayah Surakarta-Klaten-Prambanan-Yogyakarta; 2. Sudah ada integrasi antar moda di Terminal Tipe A Tirtonadi dengan Stasiun Balapan serta kereta Bandara, sehingga terintegrasi secara langsung.
3	Meningkatnya keselamatan transportasi	1. Diperlukan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penyediaan perlengkapan jalan sebagai bagian dari peningkatan keselamatan jalan diruas jalan provinsi dan kabupaten/kota; 2. Diperlukan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan rel kereta api.	PENGHAMBAT : 1. Semua jalur Kereta Api di Jawa Tengah Masuk dalam RIPNAS sehingga merupakan kewenangan Pemerintah Pusat; 2. Kebutuhan fasilitas keselamatan jalan di Ruas Jalan Nasional sangat banyak. PENDORONG : 1. Adanya jalur Kereta Api Loop yang melingkar di Provinsi Jawa Tengah; 2. Adanya Balai Pengelola Transportasi Darat di wilayah Jawa Tengah.

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

B. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Adapun telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah di dalam dokumen Renstra ini :

Tabel II.66. Telaahan Rencana Tata Wilayah

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan**							
a	Program Peningkatan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A	Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen,						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Blora, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara						
b	Program pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten/ Kota lainnya sesuai hasil kajian						
c	Program Peningkatan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Rembang						
d	Program pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten/Kota lainnya sesuai hasil kajian						
e	Program Peningkatan dan pengembangan Terminal Barang	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pati, Kota Salatiga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Magelang						
f	Program pembangunan Terminal Barang	Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang dan Kabupaten/Kota lainnya sesuai hasil kajian						
g	Program penyelenggaraan dryport	Penentuan lokasi dilakukan melalui kajian lebih lanjut						
h	Peningkatan dan pengembangan Jembatan Timbang	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung,						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Boyolali						
i	Program peningkatan dan pengembangan angkutan umum massal	Penentuan lokasi dilakukan melalui kajian lebih lanjut						
j	Pengembangan kawasan yang berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD)	WP Cibalingmas, WP Wonobanjar, WP Keburejo, WP Gelangmanggung, WP Subosukawonosraten, WP Jekuti, WP Banglor, WP Kedungsepur, WP Petanglong, dan WP Bregasmalang						
2	**Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api**							
a	Kajian perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api							
b	Peningkatan dan pengembangan Stasiun Kereta Api	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan.						
3	**Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan**							
a	Pembangunan dan peningkatan pelabuhan sungai dan danau	Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang,						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kudus.						
b	Pembangunan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan	Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kendal.						
4	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut**							
a	Peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Utama yang didukung dengan pengembangan terminal multipurpose Kabupaten Kendal.	Kota Semarang dan Kabupaten Kendal						
b	Peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpul	Kabupaten Cilacap, Kota Tegal, dan Kabupaten Batang						
c	Peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes.						
d	Peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes.						
e	Peningkatan dan pengembangan Terminal Khusus	Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, dan Kota Semarang						
f	Penataan dan pengaturan alur pelayaran masuk pelabuhan	Perairan di sekitar Kabupaten Brebes, Perairan di sekitar Kota Tegal, Perairan di sekitar Kabupaten Pemalang, Perairan di sekitar Kabupaten Batang, Perairan di sekitar Kabupaten Kendal, Perairan di sekitar Kota Semarang, Perairan di sekitar Kabupaten Demak, Perairan di sekitar Kabupaten Jepara, Perairan di sekitar Kabupaten Pati, Perairan di sekitar Kabupaten Rembang, Perairan di sekitar Kabupaten Cilacap, dan Perairan lainnya sesuai kajian yang dilakukan.						
5	**Bandar Udara Umum**							
a	Peningkatan dan pengembangan	Kota Semarang, Kabupaten Boyolali						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Bandar Udara Pengumpul							
b	Peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpan	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora.						
c	Pengembangan sistem integrasi antarmoda	Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora.						
d	Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)	Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jepara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten						
e	Peningkatan konektivitas udara dalam rangka pertumbuhan industri pariwisata dan penerbangan	Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Blora.						

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Kajian Lingkuan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam rencana pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam KLHS untuk RPJMD, analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dilakukan dengan membandingkan target indikator TPB dengan TPB sesuai Perpres 59 Tahun 2017. Adapun indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas;
2. Panjang jalur kereta api;
3. Jumlah bandara;
4. Jumlah dermaga penyeberangan;
5. Jumlah pelabuhan strategis;
6. Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan;
7. Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.

Adapun capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.67. Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 2023

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs PROVINSI	TARGET	REALISASI	KET.
Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia				
Target 3.6 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas				
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	PM	4.302	
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi				
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua				
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah	PM	1053,765	Rencana target reaktivasi jalur kereta api di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2023 bertambah menjadi 1363,655 kmsp dari 878,155 kmsp pada tahun 2018 (2020 dan 2021 terjadi refocusing anggaran pada program reaktivasi jalur kereta api non aktif di jawa tengah)
9.1.2 (a)	Jumlah bandara.	PM	6	Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Bandar Udara Adi Sumarmo Boyolali, Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap, Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga, Bandar Udara Ngloram Cepu, Bandar Udara Dewadaru Jepara
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	PM	51	Pelabuhan Laut yang digunakan sebagai angkutan penyeberangan ada 6 (Kendal, Jepara, Karimunjawa, Parang, Genting, Nyamuk). Dermaga Penyeberangan yang beroperasi sesuai KP432 sejumlah 26 (Lohmanis, Wijayapura, Sodong, Prenca, Alas Malang, Jojok, Pekuyan, Motehan, Klaces, Donan, Derm. Sungai Sleko (Plengsengan), Sungai Karanganyar, Dermaga Sungai Citanduy – Patimbuan, Dermaga Waduk Sempor, Tangen, Miri, Sumberlawang, Dermaga Kemukus di Waduk Kedungombo, Dermaga Kedunguter di Waduk Kedungombo, Dermaga Waduk Cacaban, Dermaga Mijing di Waduk Wadas Lintang, Dermaga di Waduk Gajah Mungkur, Wadaslintang, Garung, Dermaga Tritis di Waduk Wadas Lintang, Seleko) dan dermaga penyeberangan sungai yang belum diakomodir di RIPN KP 432 ada 19 dermaga (di sungai Bengawan Solo, Kali Bodri , Kalikutho, Comal, Pemali, Gangsa, Cisanggarung, Citandeuy, Kali Ijo
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis di Jawa Tengah	PM	14	Pelabuhan strategis hirarki 1 Pelabuhan Utama di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang , 2 Pelabuhan Pengumpul di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan Pelabuhan Tegal dan 8 Pelabuhan Pengumpan regional di Pelabuhan Sluke, Pelabuhan Tasikagung di Rembang, Pelabuhan Juwana di Pati, Pelabuhan Jepara, Pelabuhan Karimunjawa dan Pelabuhan Legonbajak di Jepara, Pelabuhan Batang, Pelabuhan Kendal dan 3 Pelabuhan Pengumpan Lokal di Pelabuhan Brebes, Pelabuhan Pekalongan, Pelabuhan Pemalang.
Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan				
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua				
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda	PM	16,55%	Banyaknya pengguna moda transportasi umum (AKDP, BRT Trans Jateng, BRT Trans Semarang, Batik Solo Trans) di perkotaan pada kurun waktu

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs PROVINSI	TARGET	REALISASI	KET.
	transportasi umum di perkotaan.			tertentu dibagi dengan jumlah penduduk di perkotaan (Kota Semarang, Surakarta, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang) pada kurun waktu yang sama dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%). penurunan pengguna angkutan umum terjadi karena beberapa kebijakan terkait pembatasan perjalanan akibat pandemi Covid 19
11.2.1.(b).	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	PM	2	Angkutan rel joglosemarkarto, Kaligung dan Kedungsepur

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Berikut telaah implikasi RTRW dan KLHS sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.68. Telahaan RTRW dan KLHS

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
A	RTRW		
1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan	1. Masih kurangnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B; 2. Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis; 3. Masih kurangnya jumlah pengunjung terminal tipe B.	PENGHAMBAT : 1. Belum semua Terminal Tipe B sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal); 2. Masih kurangnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ; 3. Belum semua terminal Tipe B dalam kondisi baik. PENDORONG : 1. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan tepat waktu; 2. Diterbitkannya Permendagri No.101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum; 3. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum / massal aglomerasi perkotaan; 4. Pengembangan kawasan aglomerasi dan adanya penetapan kawasan pariwisata nasional dan kawasan industry di Jawa Tengah; 5. Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe A) yang tertuang dalam

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
			Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 6. Adanya layanan transportasi umum aglomerasi perkotaan di Provinsi Jawa Tengah (TransJateng); 7. Ditetapkannya 3 Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah; 8. Sesuai dengan RTRW Provinsi terdapat kebutuhan terminal tipe B di 27 Kab/Kota.
2	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api	Masih rendahnya perlintasan sebidang yang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar.	PENGHAMBAT : Masih rendahnya perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan. PENDORONG : Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan.
3	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	Masih kurangnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP.	PENGHAMBAT : 1. Belum sepenuhnya dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya; 2. Masih rendahnya Fasilitas Pelabuhan SDP yang terpenuhi; 3. Masih rendahnya perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi ; 4. Masih rendahnya Berth occupancy ratio. PENDORONG : 1. Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
			2. Mulai Tahun 2020 sudah dilakukan review KP.432 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
4	Perwujudan Sistem jaringan transportasi laut	Masih kurangnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP.	PENGHAMBAT : 1. Belum sepenuhnya dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya; 2. Masih rendahnya Fasilitas Pelabuhan SDP yang terpenuhi; 3. Masih rendahnya perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi ; 4. Masih rendahnya Berth occupancy ratio. PENDORONG : 1. Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2. Mulai Tahun 2020 sudah dilakukan review KP.432 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
5	Bandar Udara Umum	Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	PENGHAMBAT : 1. Masih kurangnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ 2. Diperlukan fasilitasi pembangunan simpul dan layanan transportasi; 3. Tidak adanya nomenklatur program pengelolaan penerbangan pada urusan perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. PENDORONG : 1. Tingginya permintaan daerah dalam pengembangan Bandara; 2. Munculnya kawasan pengembangan strategis wilayah di kawasan DLKr dan DLKp Bandara.

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
B	KLHS		
1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	1. Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan; 2. Bertambahnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang belum tertangani; 3. Belum sepenuhnya kendaraan laik jalan di jawa tengah; 4. Belum sepenuhnya rekomendasi *ramp check* yang ditindak lanjuti.	PENGHAMBAT : 1. Belum optimalnya penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah; 2. Perlunya rekomendasi hasil Forum LLAJ; 3. Masih kurangnya kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin dibandingkan dengan jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan; 4. Masih kurangnya pemenuhan perlengkapan jalan terpasang; 5. Masih rendahnya rehabilitasi DRK; 6. Masih perlunya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi. 7. Belum sepenuhnya Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah; 8. Masih diperlukanya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Kendaraan karoseri yang sesuai uji tipe yang ditetapkan); 9. Masih rendahnya Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (sopir dan pelajar); 10. Belum sepenuhnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check; PENDORONG : 1. Koordinasi antar pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat berjalan dengan baik; 2. Sudah ditetapkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum,

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
			yang meliputi peningkatan kompetensi dan pelatihan bagi Awak kendaraan bermotor.
2	Panjang jalur kereta api	Total panjang jalur kereta api di Jawa Tengah 1.645,65 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional dan 716,15 km jalur rel non aktif/belum operasional.	PENGHAMBAT : Banyak fungsi lahan yang sudah berubah, sehingga untuk pembebasan sangat sulit dan harus mencari trase baru yang membutuhkan pembebasan tanah (factor social dan nilai investasi). PENDORONG : Provinsi Jawa Tengah memiliki jalur Kereta Api Loop.
3	Jumlah bandara	Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	PENGHAMBAT : 1. Diperlukan fasilitasi pembangunan simpul dan layanan transportasi; 2. Tidak adanya nomenklatur program pengelolaan penerbangan pada urusan perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. PENDORONG : 1. Tingginya permintaan daerah dalam pengembangan Bandara; 2. Munculnya kawasan pengembangan strategis wilayah di kawasan DLKr dan DLKp Bandara.
4	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan : permasalahan belum memenuhinya aspek keselamatan pada penyeberangan sungai	PENGHAMBAT : Penyedia layanan angkutan penyeberangan sungai belum berbadan hukum/koperasi. PENDORONG : Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5	Jumlah pelabuhan strategis	Tingginya biaya pemeliharaan untuk normalisasi alur pelayaran karena tingginya laju sedimentasi	PENGHAMBAT : Proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum selesai. PENDORONG :

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
			Mulai Tahun 2020 sudah dilakukan review KP.432 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
6	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	1. Masih Kurangnya jaringan trayek angkutan jalan; 2. Belum sepenuhnya jumlah penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru yang menggunakan angkutan umum; 3. Masih rendahnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B; 4. Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis; 5. Masih kurangnya jumlah pengunjung terminal tipe B ; 6. Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis. 7. Belum optimalnya Jumlah Penduduk yang Terlayani Trans Jateng	PENGHAMBAT : 1. Masih rendahnya jumlah total angkutan taksi berijin 2. Masih kurangnya jumlah total angkutan barang berijin 3. Masih kurangnya Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin 4. Belum Optimalnya Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif 5. Masih rendahnya jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan 6. Belum semuanya Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 7. Belum sepenuhnya penumpang angkutan umum yang terlayani 8. Belum semua Terminal Tipe B sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) 9. Masih kurangnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ 10. Belum semua terminal Tipe B dalam kondisi baik 11. Masih kurangnya Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) yang Terpenuhi 12. Belum optimalnya jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan PENDORONG : 1. Meningkatnya sektor Pariwisata dan rencana pengembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah; 2. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum / massal aglomerasi perkotaan; 3. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum

NO	IMPLIKASI RTRW/KLHS	PERMASALAHAN PD	PENGHAMBAT/PENDORONG
			yang aman, nyaman dan tepat waktu; 4. Diterbitkannya Permendagri No.101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum; 5. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum / massal aglomerasi perkotaan; 6. Pengembangan kawasan aglomerasi dan adanya penetapan kawasan pariwisata nasional dan kawasan industry di Jawa Tengah; 7. Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe A) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 8. Adanya layanan transportasi umum aglomerasi perkotaan di Provinsi Jawa Tengah (TransJateng); 9. Ditetapkannya 3 Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah; Sesuai dengan RTRW Provinsi terdapat kebutuhan terminal tipe B di 27 Kab/Kota.
7	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar	Masih rendahnya perlintasan sebidang yang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar.	PENGHAMBAT : Masih rendahnya perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan. PENDORONG : Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan.

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

C. Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan isu-isu yang ada dalam SDG's, isu nasional dalam RPJPN, isu-isu dalam KLHS terdapat potensi yang menjadi

kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran Pembangunan daerah sebagaimana berikut :

Tabel II.69. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Jumlah AKDP pada Tahun 2024 sebanyak 3.434 Kendaraan dengan 272 Trayek • Jumlah AJDP pada Tahun 2024 Sebanyak 969 Kendaraan dengan 66 Trayek	• Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah • Masih Kurangnya jaringan trayek angkutan jalan	Peningkatan sarana dan prasarana penyediaan pelayanan dasar untuk menunjang pengembangan wilayah dan ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan	SDGs 9 (Infrastruktur) & 11 (Kota & Komunitas Berkelanjutan)	Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Terdapat 19 terminal tipe a dan 23 terminal tipe b serta 178 terminal tipe c • Terdapat 1 pelabuhan utama, 2 pelabuhan pengumpul, 8 pelabuhan pengumpan regional dan 2 pelabuhan lokal • Terdapat 6 bandara. 2 Bandara dari 6 Bandar tersebut berstatus bandara internasional	• Belum optimalnya aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah di Jawa Tengah • Masih rendahnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B • Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Peningkatan sarana dan prasarana penyediaan pelayanan dasar untuk menunjang pengembangan wilayah dan ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan	SDGs 9 (Infrastruktur) & 11 (Kota & Komunitas Berkelanjutan)	Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Simpul Transportasi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Terdapat 113 stasiun terdiri dari 14 stasiun besar, 12 stasiun Kelas 1 21 stasiun Kelas 2, 66 Kelas 3	• Masih kurangnya jumlah pengunjung terminal tipe B • Masih kurangnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP					
• Jalur Kereta Api : Jalur ganda aktif 637,058 km Jalur tunggal aktif 292,44 km Jalur KA non aktif 716,153 km • Ruas Jalan di Jawa Tengah Nasional 1.581,	Belum optimalnya Jumlah Penduduk yang Terlayani Trans Jateng	Peningkatan sarana dan prasarana penyediaan pelayanan dasar untuk menunjang pengembangan wilayah dan ekonomi	SDGs 9 (Infrastruktur) & 11 (Kota & Komunitas Berkelanjutan)	Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Optimalisasi ruang pergerakan dengan peningkatan kualitas layanan angkutan umum.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
30 KM Provinsi 2.440,12 KM • Potensi jaringan angkutan aglomerasi perkotaan Trans Jateng pada 14 Kabupaten/Kota dan 5 Wilayah Pengembangan		daerah yang tangguh dan berkelanjutan		terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi		
• Telah disusun Rencana Aksi Keselamatan Daerah • Telah diidentifikasi kebutuhan perlengkapan jalan di jalan provinsi per jenis	• Masih tingginya kecelakaan perjalanan transportasi • Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan	• Keselamatan transportasi darat dan perlintasan sebidang • Pengurangan risiko bencana dan kecelakaan • Peningkatan	SDGs 3 (Kesehatan & Keselamatan) & 11 (Transportasi aman & inklusif)	• Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan,	• Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan keselamatan perlajanan transportasi di jawa tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
perlengkapan jalan	perlengkapan jalan • Masih terjadi kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang belum tertangani • Belum sepenuhnya kendaraan laik jalan di jawa tengah • Belum sepenuhnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti	kualitas infrastruktur berkelanjutan		infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi • Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi		

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	• Masih rendahnya perlintasan sebidang yang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar					

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Perangkat Daerah, di atas selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

A. Peningkatan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah

Salah satu isu utama dalam sektor transportasi di Provinsi Jawa Tengah adalah konektivitas antarwilayah. Hal ini semakin penting mengingat fokus arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah, yaitu "Meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional". Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sektor perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung sistem distribusi logistik pangan. Upaya ini terutama ditujukan untuk memastikan kelancaran mobilitas barang dari dan menuju wilayah penumpu pangan di Jawa Tengah, serta menjamin keterhubungan distribusi hingga ke wilayah tujuan. Intervensi yang diperlukan mencakup peningkatan dan penyediaan infrastruktur perlengkapan jalan guna mendukung kelancaran arus logistik serta penanganan daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan provinsi, sebagai upaya untuk menekan risiko kecelakaan sekaligus menjamin keselamatan pengguna jalan. Dengan adanya penguatan konektivitas transportasi melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan distribusi logistik pangan di Jawa Tengah dapat berlangsung lebih efisien, aman, dan berkesinambungan, sehingga mampu memperkuat peran Jawa Tengah sebagai salah satu pusat ketahanan pangan nasional.Peningkatan kualitas simpul transportasi

B. Peningkatan Kualitas Simpul Transportasi

Kondisi prasarana pada simpul-simpul transportasi di Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya dalam pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Keterbatasan sarana dan prasarana ini berimplikasi pada belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi. Di sisi lain, dengan adanya pengembangan infrastruktur strategis sektor transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di wilayah Jawa Tengah, diperlukan peran fasilitatif dari Pemerintah Provinsi untuk mendukung keberlanjutan dan optimalisasi pemanfaatannya. Salah satu contoh yang krusial adalah kondisi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, yang saat ini mengalami pendangkalan alur pelayaran. Terdapat perbedaan kedalaman antara kolam pelabuhan (-12 MLWS) dengan alur pelayaran (-10 MLWS), sehingga pelabuhan hanya mampu melayani kapal dengan ukuran Panamax size (<90.000 GT). Kondisi ini membatasi kapasitas pelabuhan dalam mendukung arus logistik berskala besar.

Selain itu, dalam rangka penyusunan Revisi Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.11/11.393 telah menyampaikan usulan terkait Pelabuhan Kendal. Usulan tersebut adalah perubahan status dari semula

Pelabuhan Pengumpan Regional menjadi dermaga/bagian dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dengan perubahan tersebut, Pelabuhan Kendal diharapkan dapat melayani pelayaran internasional, sehingga mampu memperkuat fungsi Jawa Tengah sebagai simpul logistik nasional dan mendukung konektivitas perdagangan global.

Isu lain yang tak kalah penting yaitu kembalinya status Bandara Internasional Ahmad Yani yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 26 Tahun 2025. Dengan kembalinya status Bandara Internasional Ahmad Yani diharapkan dapat memberi kemudahan akses kepada investor yang berinvestasi di Provinsi Jawa Tengah, serta meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu pada tanggal 8 Agustus telah diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 37 Tahun 2025 tentang peningkatan status Bandar Udara Adi Soemarmo sebagai Bandar Udara Internasional.

C. Optimalisasi ruang pergerakan dengan peningkatan kualitas layanan angkutan umum

Tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi merupakan isu lain di sektor transportasi, hal ini menyebabkan beberapa ruas jalan menjadi rawan macet. Sehingga dibutuhkan utamanya untuk mengalihkan pengguna kendaraan probadi ke angkutan umum serta pengalihan moda jalan ke moda transportasi lainnya. Hal ini dibutuhkan peran Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi rencana Pemerintah Pusat dalam pengembangan angkutan umum berbasis rel.

D. Peningkatan keselamatan perlajanan transportasi di jawa tengah

Isu penting yang masih menjadi tantangan besar dalam sektor transportasi di Provinsi Jawa Tengah adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas, baik di jalan raya maupun pada perlintasan sebidang kereta api. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih banyaknya Daerah Rawan Kecelakaan yang tersebar di berbagai wilayah, khususnya pada ruas jalan provinsi yang memiliki intensitas lalu lintas tinggi dan berperan penting dalam mobilitas orang maupun distribusi barang.

Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 24.171 kasus kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 4.164 jiwa, atau rata-rata 11 orang meninggal per hari. Angka tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas tinggi di Indonesia.

Selain itu, kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api juga masih menjadi permasalahan serius. Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 83 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang yang berada di bawah wilayah kerja DAOP 4 Semarang, DAOP 5 Purwokerto, dan DAOP 6 Yogyakarta. Tingginya angka kecelakaan tersebut menunjukkan masih terbatasnya fasilitas pengaman perlintasan serta rendahnya disiplin pengguna jalan dalam mematuhi aturan lalu lintas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penjabaran visi dan misi daerah mendasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk "**NGOPENI. NGLAKONI. Jateng**". Dengan landasan filosofis tersebut maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

"JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dilaksanakan dengan 3 (tiga) fokus kerja yaitu:

1. Jateng Sigap;
2. Jateng Makmur;
3. Jateng Nyaman.

Penerjemahan visi dan misi daerah menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029 dirumuskan melalui *logframe* pembangunan daerah Jawa Tengah sebagai berikut.

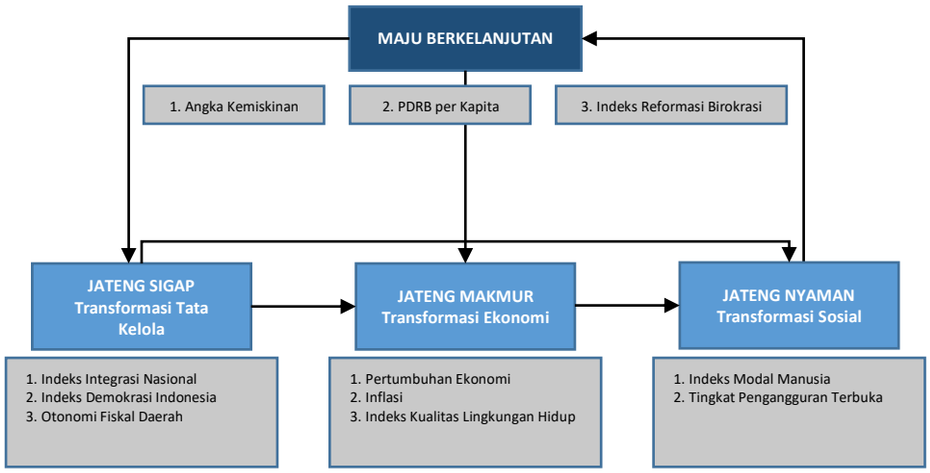

Gambar III.1. *Logframe* Pembangunan Daerah *Provinsi* Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Mendasarkan pada *logframe* pembangunan tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam upaya penjabaran visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 sebagai berikut.

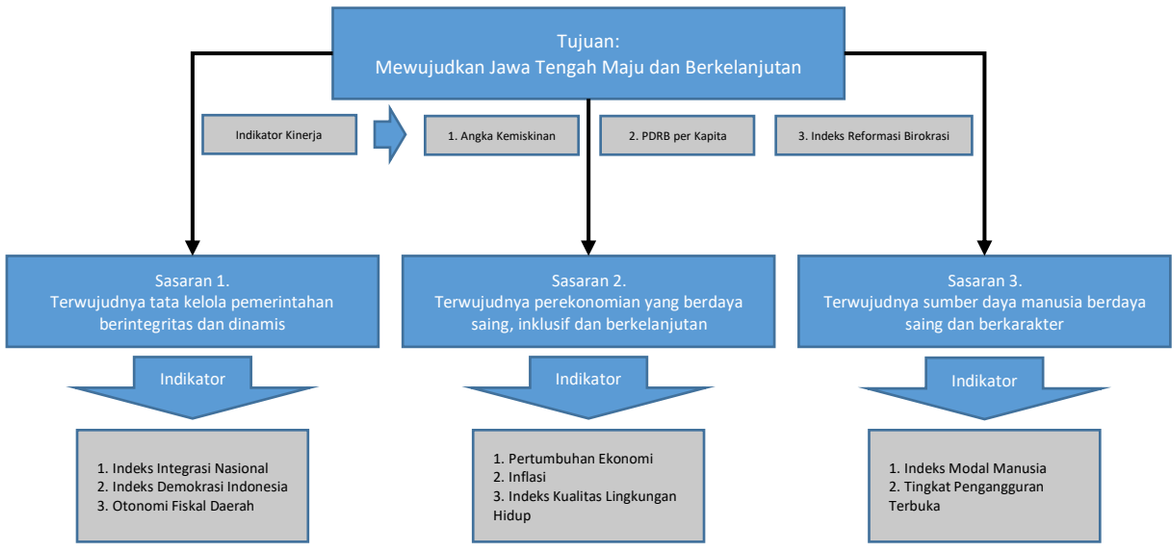

Gambar III.2. *Cascading* Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi dapat diimplementasikan secara konsisten setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan tahapan pembangunan. Tahapan pembangunan ini merumuskan prioritas pembangunan tahunan yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi, misi, serta tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun penahapan serta fokus tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut.

Gambar III.3.
Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan tujuan dan sasaran guna mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 sebagai berikut.

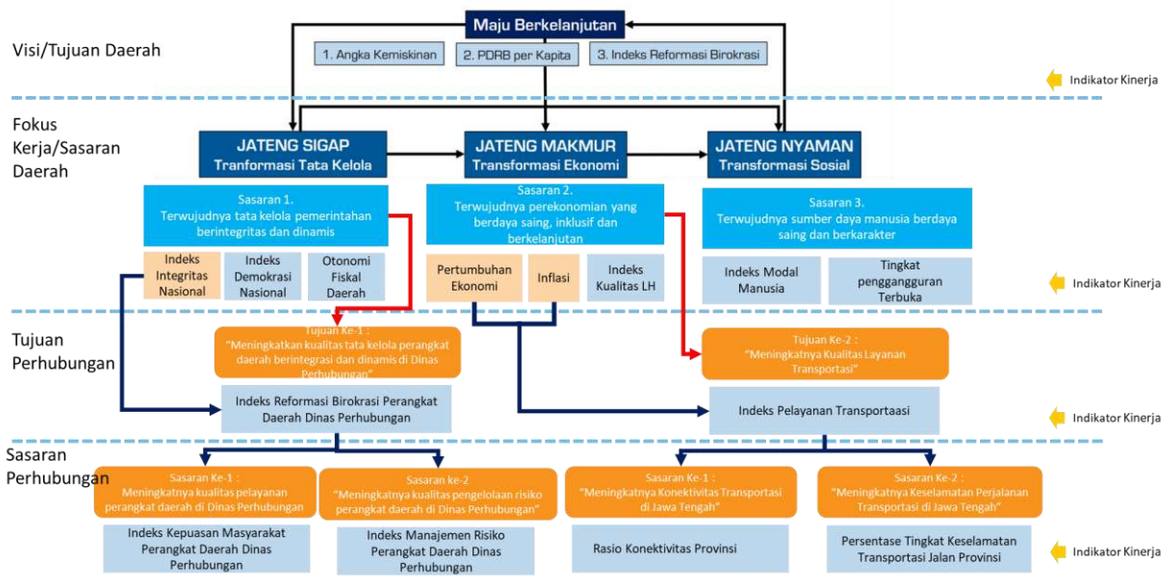

Gambar III.4.
Cascading Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Adapun tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan transportasi dengan indikator tujuan Indeks pelayanan transportasi, diharapkan pada akhir Tahun 2030 mencapai angka 7,242;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, diharapkan pada Tahun 2030 mencapai angka 85,35.

Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Ke-1 sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah Ke-2

"Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan". Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Ke-2 sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah Ke-1 "Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis". Sasaran daerah dimaksud mendukung pada tujuan Daerah "Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan".

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan "Meningkatkan kualitas layanan transportasi" terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah, dengan indikator Rasio konektivitas provinsi pada Tahun 2030 sebesar 0,401;
2. Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah, dengan indikator Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi pada Tahun 2030 sebesar 99,9853%.

Untuk mendukung pencapaian tujuan "Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan" terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perhubungan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan pada Tahun 2030 sebesar 81,80%;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan, dengan indikator Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubungan pada Tahun 2030 sebesar 3,30.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dijabarkan menjadi rumusan program sebagai berikut.

Gambar III.5.
Rangkuman Program Pembangunan Daerah

Tabel III.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi		Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,345	6,614	6,660	6,788	6,904	7,019	7,126	7,242	7,242
		Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	%	99,9824	99,9830	99,9836	99,9838	99,9842	99,9846	99,9850	99,9853	99,9853
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0,206	0,264	0,274	0,302	0,327	0,352	0,375	0,401	0,401
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	83,03	85,09	85,12	85,15	85,20	85,25	85,30	85,35	85,35
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	80,13	81,50	81,55	81,60	81,65	81,70	81,75	81,80	81,80
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	3,08	3,03	3,07	3,11	3,15	3,19	3,23	3,30	3,30

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah -langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah akan dicapai. Rumusan strategi dilakukan melalui metode analisa SWOT dalam melihat Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman) dan diformulasikan dalam pohon kinerja yang merupakan landasan berpikir logis dari proses bisnis yang dilakukan. Pohon Kinerja merupakan alat bantu untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan – kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah dengan:

1. Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dengan meningkatkan cakupan layanan transportasi, meningkatkan kualitas layanan angkutan umum meningkatkan kemudahan perpindahan Antarmoda serta mengembangkan system jaringan dan simpul transportasi;
2. Meningkatkan keselamatan layanan transportasi dengan meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan implementasi regulasi, serta meningkatkan kualitas SDM Transportasi dan keterlibatan masyarakat;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian, dan keuangan;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi wilayah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan pembangunan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Daerah: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan	**Sasaran Daerah :** Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan	Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui	Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan dengan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan selaras dengan perencanaan tata ruang yang responsif.
Tujuan Dinas Perhubungan : Meningkatkan kualitas layanan transportasi	**Sasaran Dinas Perhubungan :** Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah	Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dengan meningkatkan cakupan layanan transportasi, meningkatkan kualitas layanan angkutan umum meningkatkan kemudahan perpindahan Antarmoda serta mengembangkan system jaringan dan simpul transportasi	1. Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan 2. Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi melaui pengendalian dan pengawasan penyediaan angkutan umum; 3. Peningkatan kunjungan Bus dan penumpang di terminal tipe B 4. Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi 5. Peningkatan jumlah penduduk terlayani (Trans Jateng) 6. Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai dan pemenuhan Fasilitas Pelayanan Dermaga sungai serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.
	Sasaran Dinas Perhubungan : Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah	Meningkatkan keselamatan layanan transportasi dengan meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan implementasi regulasi, serta meningkatkan kualitas SDM Transportasi dan keterlibatan masyarakat	1. Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan; 2. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi; 3. Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah; 4. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Daerah : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan	Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Meningkatkan birokrasi yang berintegritas dan dinamis melalui	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan responsif berbasis teknologi informasi 2. Penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi
Tujuan Dinas Perhubungan : Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan	**Sasaran Dinas Perhubungan :** Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	1. Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 3. Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 4. Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah 5. Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah 7. Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	Sasaran Dinas Perhubungan : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Tabel III.3.Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (Kajian FS dan ATP/WTP Inisiasi Layanan Trans Jateng Executive Koridor Bawen – Tawang; DED Trans Jateng Koridor Kab. Magelang – Kota Magelang – Kab. Temanggung; Masterplan Trans Jateng Jekuti DED Trans Jateng Petanglong) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (DED Trans Jateng Jekuti, ATP / WTP Trans Jateng Jekuti, ATP / WTP Trans Jateng Petanglong) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (DED Trans Jateng Cibalingmas, ATP / WTP Trans Jateng Cibalingmas) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (FS (Sosial dan Teknis) & DED Semarang – Demak, ATP / WTP Trans Jateng Semarang – Demak) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (FS Bregasmalang, FS Banglor, FS Wonobanjar) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi melaui pengendalian dan pengawasan penyediaan angkutan umum;	Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi melaui pengendalian dan pengawasan penyediaan angkutan umum;	Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi melaui pengendalian dan pengawasan penyediaan angkutan umum;	Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi melaui pengendalian dan pengawasan penyediaan angkutan umum;	Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi melaui pengendalian dan pengawasan penyediaan angkutan umum;

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan kunjungan Bus dan penumpang di terminal tipe B melalui peningkatan terminal tipe B kondisi baik dan sesuai Standart dengan pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo, revitalisasi Terminal Tipe B Purbalingga serta pemeliharaan terminal tipe B di Jawa Tengah;	Peningkatan kunjungan Bus dan penumpang di terminal tipe B melalui peningkatan terminal tipe B kondisi baik dan sesuai Standart dengan pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo, revitalisasi Terminal Tipe B Madureso dan Tawangmangu serta pemeliharaan terminal tipe B di Jawa Tengah;	Peningkatan kunjungan Bus dan penumpang di terminal tipe B melalui peningkatan terminal tipe B kondisi baik dan sesuai Standart dengan revitalisasi Terminal Tipe B Banyuputih serta pemeliharaan terminal tipe B di Jawa Tengah;	Peningkatan kunjungan Bus dan penumpang di terminal tipe B melalui peningkatan terminal tipe B kondisi baik dan sesuai Standart dengan revitalisasi Terminal Tipe B Purbalingga, Tawanmangu dan Madureso serta pemeliharaan terminal tipe B di Jawa Tengah;	Peningkatan kunjungan Bus dan penumpang di terminal tipe B melalui peningkatan terminal tipe B kondisi baik dan sesuai Standart dengan revitalisasi Terminal Tipe B Bumiayu, Sukoharjo, dan Penggaron serta pemeliharaan terminal tipe B di Jawa Tengah;
Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek aglomerasi perkotaan dan pedesaan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;	Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek aglomerasi perkotaan dan pedesaan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;	Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek aglomerasi perkotaan dan pedesaan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;	Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek aglomerasi perkotaan dan pedesaan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;	Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek aglomerasi perkotaan dan pedesaan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan jumlah penduduk terlayani (Trans Jateng) melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter dan penyediaan angkutan Trans Jateng (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Cibalingmas, Gelangmanggung, Keburejo, Subosukawonosraten);	Peningkatan jumlah penduduk terlayani (Trans Jateng) melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter dan penyediaan angkutan Trans Jateng (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Cibalingmas, Gelangmanggung, keburejo, Subosukawonosraten dan penambahan operasional koridor baru pada wilayah pengembangan Gelangmanggung serta Moderanisasi armada Trans Jateng pada koridor Semarang-Bawen);	Peningkatan jumlah penduduk terlayani (Trans Jateng) melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter dan penyediaan angkutan Trans Jateng (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Cibalingmas, Subosukawonosraten, Gelangmanggung, keburejo dan penambahan operasional koridor baru pada wilayah Petanglong dan Jekuti serta Moderanisasi armada Trans Jateng pada koridor Semarang-Bawen dan koridor Purwokerto-Purbalingga);	Peningkatan jumlah penduduk terlayani (Trans Jateng) melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter dan penyediaan angkutan Trans Jateng (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Cibalingmas, Subosukawonosraten, keburejo, Gelangmanggung, Jekuti, Petanglong dan penambahan operasional koridor baru pada wilayah pengembangan Cibalingmas serta Moderanisasi armada Trans Jateng pada koridor Semarang-Kendal);	Peningkatan jumlah penduduk terlayani (Trans Jateng) melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter dan penyediaan angkutan Trans Jateng (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Cibalingmas, Subosukawonosraten, Jekuti, Petanglong, keburejo, Gelangmanggung dan Penambahan koridor baru Semarang – Demak (Kedungsepur) serta Moderanisasi armada Trans Jateng pada koridor Kutoarjo-Magelang, Solo-Sumberlawang, serta Semarang-Bawen);
Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai dan pemenuhan Fasilitas Pelayanan Dermaga sungai serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.	Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai dan pemenuuhan Fasilitas Pelayanan Dermaga sungai serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.	Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai dan pemenuuhan Fasilitas Pelayanan Dermaga sungai serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.	Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai dan pemenuuhan Fasilitas Pelayanan Dermaga sungai serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.	Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai dan pemenuuhan Fasilitas Pelayanan Dermaga sungai serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung Konektivitas daerah penghasil pangan (Beras) yang ada di Jawa Tengah (Kab. Cilacap, Kab. Sragen, Kab. Grobogan);	Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung Akses Pariwisata Borobudur, Dieng, Tawangmangu, Kaliangkrik serta Geopark;	Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung Akses distribusi daerah industri yang ada di Pantura KITB dan KIK Kendal serta daerah industri potensial lainnya;	Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya peningkatan konektivitas antar wilayah yang ada di Jawa Tengah;	Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya peningkatan konektivitas antar wilayah yang ada di Jawa Tengah;
Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi;	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi;	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi;	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi;	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi;
Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Palaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar;	Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Palaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar;	Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Palaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar;	Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Palaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar;	Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Palaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar;

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi.	Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi.	Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi.	Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi	Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi.
Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah
Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah
Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan renstra dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis

Hasil identifikasi terdapat 2 (dua) penyataan Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diantaranya :

1. Berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP pada Sasaran Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah;
2. Meningkatnya frekuensi kecelakaan transportasi pada Sasaran Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah;

Sesuai dengan perhitungan skala resiko terdapat pernyataan resiko yang membutuhakan Rencana Tindak Pengendalian. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sesuai tabel berikut.

Tabel III.4. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi JawaTengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah	Rasio Konektivitas Provinsi	Berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP	9	Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi)	Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa	Evaluasi Jaringan Trayek dan Tarif	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun
Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi	12	1. *Human Error*; 2. Ketidak laikan kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan	Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas	Peningkataan koordinasi dengan istansi terkait untuk kecepatan respon penanganan, Sosialisasi *call center* fasilitas kesehatan, Sosilisasi pertolongan pertama terhadap penanganan kecelakan	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2026-2030 yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana Tabel, Sebagai berikut :

Tabel IV.1.Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan *									66.408.998.000		70.790.626.000		76.725.776.000		76.975.776.000		72.645.776.000	Dinas Perhubungan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan *	Angka	85,09	85,12	85,15		85,2		85,25		85,3		85,35		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Perhubungan **								65.992.398.000		70.374.026.000		76.255.776.000		76.505.776.000		72.175.776.000	Dinas Perhubungan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan **	Angka	81,5	81,55	81,6	65.992.398.000	81,65	70.374.026.000	81,7	76.255.776.000	81,75	76.505.776.000	81,8	72.175.776.000	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							64.590.971.000		68.597.099.000		74.274.349.000		74.724.349.000		70.424.349.000	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan ***	%	100	100	100	64.590.971.000	100	68.597.099.000	100	74.274.349.000	100	74.724.349.000	100	70.424.349.000	Dinas Perhubungan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							46.794.366.000		50.688.719.000		52.108.469.000		52.108.469.000		52.108.469.000	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada sekretariat	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	36	36	36	46.794.366.000	36	50.688.719.000	36	52.108.469.000	36	52.108.469.000	36	52.108.469.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseline Tahun 2024 (R)	Baseline Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							45.949.166.000		49.843.519.000		51.263.269.000		51.263.269.000		51.263.269.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang /Bulan	300	300	300	45.949.166.000	300	49.843.519.000	300	51.263.269.000	300	51.263.269.000	300	51.263.269.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi Pegawai di Kantor Induk dan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan, JAWA TENGAH
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							745.200.000		745.200.000		745.200.000		745.200.000		745.200.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	745.200.000	12	745.200.000	12	745.200.000	12	745.200.000	12	745.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD *****	Laporan	12	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****							1.155.000.000		1.155.000.000		1.155.000.000		1.155.000.000		1.155.000.000	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							1.155.000.000		1.155.000.000		1.155.000.000		1.155.000.000		1.155.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksanany a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							175.000.000		175.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada sekretariat	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	175.000.000	100	175.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		135.000.000		135.000.000		135.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	N/A	0	N/A	0	1	135.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksanany a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provins

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksanany a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	150	150	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							1.855.500.000		1.855.500.000		1.978.000.000		1.978.000.000		1.978.000.000	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada sekretariat	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	1.855.500.000	100	1.855.500.000	100	1.978.000.000	100	1.978.000.000	100	1.978.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							48.000.000		48.000.000		88.000.000		88.000.000		88.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	48.000.000	1	48.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	1	88.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							82.500.000		82.500.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	82.500.000	1	82.500.000	1	165.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	40	40	40	5.000.000	40	5.000.000	40	5.000.000	40	5.000.000	40	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksanany a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksanany a Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Doku men	12	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							2.115.000.000		1.905.000.000		5.905.000.000		6.355.000.000		1.905.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	16	2	11	2.115.000.000	11	1.905.000.000	15	5.905.000.000	16	6.355.000.000	11	1.905.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	2	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengadaan Mebel *****							50.000.000		0		500.000.000		200.000.000		0	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	2	50.000.000	N/A	0	2	500.000.000	1	200.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							80.000.000		0		1.500.000.000		1.500.000.000		0	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	3	80.000.000	N/A	0	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		2.000.000.000		2.000.000.000		0	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							185.000.000		105.000.000		105.000.000		855.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	16	N/A	5	185.000.000	10	105.000.000	10	105.000.000	12	855.000.000	10	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							11.108.705.000		11.330.480.000		11.330.480.000		11.330.480.000		11.330.480.000	Dinas Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada sekretariat	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	36	36	36	11.108.705.000	36	11.330.480.000	36	11.330.480.000	36	11.330.480.000	36	11.330.480.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksanany a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							1.589.225.000		1.811.000.000		1.811.000.000		1.811.000.000		1.811.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	1.589.225.000	12	1.811.000.000	12	1.811.000.000	12	1.811.000.000	12	1.811.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							9.515.480.000		9.515.480.000		9.515.480.000		9.515.480.000		9.515.480.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	9.515.480.000	12	9.515.480.000	12	9.515.480.000	12	9.515.480.000	12	9.515.480.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							1.387.400.000		1.487.400.000		1.487.400.000		1.487.400.000		1.637.400.000	Dinas Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseline Tahun 2024 (R)	Baseline Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada sekretariat	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	285	283	288	1.387.400.000	288	1.487.400.000	288	1.487.400.000	288	1.487.400.000	288	1.637.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							857.400.000		857.400.000		857.400.000		857.400.000		857.400.000	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	73	73	73	857.400.000	73	857.400.000	73	857.400.000	73	857.400.000	73	857.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksanany a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	24	24	29	80.000.000	29	80.000.000	29	80.000.000	29	80.000.000	29	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	3	4	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	92	93	92	100.000.000	92	100.000.000	92	100.000.000	92	100.000.000	92	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		300.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	93	93	93	150.000.000	93	150.000.000	93	150.000.000	93	150.000.000	93	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI ***							170.340.000		200.340.000		200.340.000		200.340.000		200.340.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaia n, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ***	%	100	100	100	170.340.000	100	200.340.000	100	200.340.000	100	200.340.000	100	200.340.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							82.340.000		112.340.000		112.340.000		112.340.000		112.340.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ****	%	100	100	100	82.340.000	100	112.340.000	100	112.340.000	100	112.340.000	100	112.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							37.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	37.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							19.340.000		19.340.000		19.340.000		19.340.000		19.340.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	19.340.000	1	19.340.000	1	19.340.000	1	19.340.000	1	19.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksanany a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah I Kelas A	Lapor an	24	24	24	21.000.000	24	21.000.000	24	21.000.000	24	21.000.000	24	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				****															
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksanany a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Lapor an	N/A	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Lapor an	12	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ****	Unit	11	11	9	54.000.000	9	54.000.000	9	54.000.000	9	54.000.000	9	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	10	10	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	8	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							136.112.000		166.112.000		166.112.000		166.112.000		161.112.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ***	%	100	100	100	136.112.000	100	166.112.000	100	166.112.000	100	166.112.000	100	161.112.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	5	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							64.112.000		94.112.000		94.112.000		94.112.000		94.112.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ****	%	100	100	100	64.112.000	100	94.112.000	100	94.112.000	100	94.112.000	100	94.112.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan							35.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Kantor *****																Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	35.500.000	1	65.500.000	1	65.500.000	1	65.500.000	1	65.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseline Tahun 2024 (R)	Baseline Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							7.612.000		7.612.000		7.612.000		7.612.000		7.612.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.612.000	1	7.612.000	1	7.612.000	1	7.612.000	1	7.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksanany a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah II Kelas A ****	Lapor an	12	12	24	8.000.000	24	8.000.000	24	8.000.000	24	8.000.000	24	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksanany a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Lapor an	N/A	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Lapor an	12	12	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							51.000.000		51.000.000		51.000.000		51.000.000		51.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ****	Unit	2	2	6	51.000.000	6	51.000.000	6	51.000.000	6	51.000.000	6	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							259.600.000		285.100.000		289.600.000		289.600.000		284.600.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ***	%	100	100	100	259.600.000	100	285.100.000	100	289.600.000	100	289.600.000	100	284.600.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							140.000.000		165.500.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ****	%	100	100	100	140.000.000	100	165.500.000	100	170.000.000	100	170.000.000	100	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							44.500.000		70.000.000		74.500.000		74.500.000		74.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	44.500.000	1	70.000.000	1	74.500.000	1	74.500.000	1	74.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	52.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksanany a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							46.600.000		46.600.000		46.600.000		46.600.000		46.600.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
																		III Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ****	Laporan	12	12	24	46.600.000	24	46.600.000	24	46.600.000	24	46.600.000	24	46.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksanany a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							45.600.000		45.600.000		45.600.000		45.600.000		45.600.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	45.600.000	12	45.600.000	12	45.600.000	12	45.600.000	12	45.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ****	Unit	21	21	21	60.000.000	21	60.000.000	21	60.000.000	21	60.000.000	21	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi *****	Unit	20	20	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							177.200.000		207.200.000		207.200.000		207.200.000		202.200.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ***	%	100	100	100	177.200.000	100	207.200.000	100	207.200.000	100	207.200.000	100	202.200.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Doku men	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksanany a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Doku men	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							84.200.000		114.200.000		114.200.000		114.200.000		114.200.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ****	%	100	100	100	84.200.000	100	114.200.000	100	114.200.000	100	114.200.000	100	114.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							37.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000		67.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	37.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	1	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							21.200.000		21.200.000		21.200.000		21.200.000		21.200.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	21.200.000	1	21.200.000	1	21.200.000	1	21.200.000	1	21.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksanany a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ****	Laporan	24	24	24	26.000.000	24	26.000.000	24	26.000.000	24	26.000.000	24	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ****	Unit	8	8	8	54.000.000	8	54.000.000	8	54.000.000	8	54.000.000	8	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	7	7	7	4.000.000	7	4.000.000	7	4.000.000	7	4.000.000	7	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							162.275.000		192.275.000		192.275.000		192.275.000		187.275.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ***	%	100	100	100	162.275.000	100	192.275.000	100	192.275.000	100	192.275.000	100	187.275.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
																		V Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksanany a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Doku men	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							82.200.000		112.200.000		112.200.000		112.200.000		112.200.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ****	%	100	100	100	82.200.000	100	112.200.000	100	112.200.000	100	112.200.000	100	112.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							36.500.000		66.500.000		66.500.000		66.500.000		66.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	36.500.000	1	66.500.000	1	66.500.000	1	66.500.000	1	66.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	1	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Disediakan *****															
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							22.200.000		22.200.000		22.200.000		22.200.000		22.200.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	22.200.000	1	22.200.000	1	22.200.000	1	22.200.000	1	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksanany a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							14.075.000		14.075.000		14.075.000		14.075.000		14.075.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah V Kelas A ****	Lapor an	24	24	24	14.075.000	24	14.075.000	24	14.075.000	24	14.075.000	24	14.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							13.075.000		13.075.000		13.075.000		13.075.000		13.075.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	13.075.000	12	13.075.000	12	13.075.000	12	13.075.000	12	13.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							53.000.000		53.000.000		53.000.000		53.000.000		53.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ****	Unit	9	9	7	53.000.000	7	53.000.000	7	53.000.000	7	53.000.000	7	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	8	8	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							183.900.000		213.900.000		213.900.000		213.900.000		208.900.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ***	%	100	100	100	183.900.000	100	213.900.000	100	213.900.000	100	213.900.000	100	208.900.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseline Tahun 2024 (R)	Baseline Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksanany a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Doku men	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							88.500.000		118.500.000		118.500.000		118.500.000		118.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ****	%	100	100	100	88.500.000	100	118.500.000	100	118.500.000	100	118.500.000	100	118.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan							38.500.000		68.500.000		68.500.000		68.500.000		68.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Kantor *****																Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	2	1	38.500.000	1	68.500.000	1	68.500.000	1	68.500.000	1	68.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksanany a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							27.400.000		27.400.000		27.400.000		27.400.000		27.400.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ****	Laporan	24	12	24	27.400.000	24	27.400.000	24	27.400.000	24	27.400.000	24	27.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							26.400.000		26.400.000		26.400.000		26.400.000		26.400.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ****	Unit	13	13	16	55.000.000	16	55.000.000	16	55.000.000	16	55.000.000	16	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PEKALONGAN
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	12	12	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							312.000.000		512.000.000		712.000.000		512.000.000		507.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A ***	%	100	100	100	312.000.000	100	512.000.000	100	712.000.000	100	512.000.000	100	507.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A ****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A ****	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							41.500.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000		41.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A ****	%	100	100	100	41.500.000	100	41.500.000	100	41.500.000	100	41.500.000	100	41.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							0		200.000.000		400.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A ****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	200.000.000	2	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		200.000.000		400.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	200.000.000	2	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A ****	Lapor an	12	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							252.500.000		252.500.000		252.500.000		252.500.000		252.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A ****	Unit	7	7	7	252.500.000	7	252.500.000	7	252.500.000	7	252.500.000	7	252.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksanany a Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksanany a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	5	5	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan **							416.600.000		416.600.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000	Dinas Perhubungan	
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubungan **	Angka	3,03	3,07	3,11	416.600.000	3,15	416.600.000	3,19	470.000.000	3,23	470.000.000	3,3	470.000.000	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							416.600.000		416.600.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan ***	%	100	100	100	416.600.000	100	416.600.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	Dinas Perhubungan	
		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****							416.600.000		416.600.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundang	%	100	100	100	416.600.000	100	416.600.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				an ****															
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							261.600.000		261.600.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Perhubungan	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	9	9	9	261.600.000	9	261.600.000	9	300.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							85.000.000		85.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksanany a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	4	4	4	85.000.000	4	85.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terlaksanany a Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	126	50.000.000	126	50.000.000	126	50.000.000	126	50.000.000	126	50.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perhubungan	
			Terselenggara nya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi *									142.811.886.000		160.438.983.000		200.749.755.000		229.993.702.000		277.577.027.000	Dinas Perhubungan	
				Indeks Pelayanan Transportasi *	Angka	6,614	6,66	6,788		6,904		7,019		7,126		7,242		Dinas Perhubungan	
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah **							130.602.007.000		142.326.510.000		171.718.153.000		198.623.920.000		230.986.020.000	Dinas Perhubungan	
				Rasio Konektivitas Provinsi **	Angka	0,264	0,274	0,302	130.602.007.000	0,327	142.326.510.000	0,352	171.718.153.000	0,375	198.623.920.000	0,401	230.986.020.000	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							2.063.478.000		2.143.478.000		2.058.478.000		2.013.478.000		2.083.478.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Meningkatnya jaringan trayek angkutan jalan	Rasio Trayek Angkutan Jalan ***	Angka	42,08	44,24	46,74	1.033.478.000	48,28	1.043.478.000	49,83	958.478.000	51,39	913.478.000	52,43	983.478.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahnya jumlah total angkutan barang berijin	Persentase angkutan barang yang berijin ****	%	67,56	68,25	68,95	40.000.000	69,64	40.000.000	70,33	40.000.000	71,02	40.000.000	71,72	40.000.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****	Unit	264	60	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	Bidang Angkutan Jalan JAWA TENGAH
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							650.288.000		560.288.000		475.288.000		430.288.000		500.288.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahnya Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****	%	35,9	41,03	48,72	650.288.000	51,28	560.288.000	53,85	475.288.000	56,41	430.288.000	56,41	500.288.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	
		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi *****							525.000.000		315.000.000		210.000.000		210.000.000		325.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi *****	Doku men	2	2	5	525.000.000	3	315.000.000	2	210.000.000	2	210.000.000	3	325.000.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	BANYUMAS BATANG Bidang Angkutan Jalan CILACAP MAGELANG PEKALONGAN TEMANGGUNG
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi *****							125.288.000		245.288.000		265.288.000		220.288.000		175.288.000	Dinas Perhubung an - Bidang Angkutan Jalan	
			Terlaksanany a Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaa n Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenanga n Provinsi *****	Doku men	7	7	7	125.288.000	8	245.288.000	10	265.288.000	11	220.288.000	12	175.288.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	BANYUMAS Bidang Angkutan Jalan CILACAP GROBOGAN JEPARA KENDAL KOTA SURAKARTA MAGELANG PATI PEKALONGAN PURBALINGGA PURWOREJO SEMARANG SRAGEN TEMANGGUNG WONOGIRI
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							35.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000	Dinas Perhubung an - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahny a jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Presentase jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan ****	%	4	9	13,04	35.000.000	17,39	135.000.000	21,74	135.000.000	26,09	135.000.000	30,43	135.000.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi *****							0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi *****	Doku men	1	N/A	N/A	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi *****	Doku men	1	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	BANYUMAS Bidang Angkutan Jalan BLORA DEMAK KENDAL MAGELANG SEMARANG SRAGEN TEGAL
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							223.190.000		223.190.000		223.190.000		223.190.000		223.190.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahnya Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	Persentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin ****	%	52,34	52,71	53,1	223.190.000	53,53	223.190.000	53,99	223.190.000	54,47	223.190.000	54,99	223.190.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *****							223.190.000		223.190.000		223.190.000		223.190.000		223.190.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan *****	Unit	22	24	26	223.190.000	28	223.190.000	30	223.190.000	32	223.190.000	34	223.190.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	Bidang Angkutan Jalan JAWA TENGAH KOTA SEMARANG
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahnya jumlah total angkutan taksi berijin	Persentase angkutan taksi terpenuhi ****	%	18,17	18,48	18,85	35.000.000	19,22	35.000.000	19,59	35.000.000	19,96	35.000.000	20,32	35.000.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *****							35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Tersedianya Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan *****	Unit	76	32	37	35.000.000	37	35.000.000	37	35.000.000	37	35.000.000	37	35.000.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	Bidang Angkutan Jalan CILACAP JAWA TENGAH KOTA SEMARANG PURBALINGGA SRAGEN WONOSOBO
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahnya Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif	Presentase Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif ****	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	Bidang Angkutan Jalan JAWA TENGAH
			Meningkatnya penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru yang menggunakan angkutan umum	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum ***	%	67,05	69,13	69,85	1.030.000.000	70,55	1.100.000.000	71,26	1.100.000.000	71,97	1.100.000.000	72,69	1.100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							1.030.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Bertambahnya penumpang angkutan umum yang terlayani	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani ****	Orang	33656899	34702831	35063886	1.030.000.000	35414525	1.100.000.000	35768670	1.100.000.000	36126357	1.100.000.000	36487620	1.100.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseline Tahun 2024 (R)	Baseline Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi *****							1.030.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan	
			Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi *****	Laporan	3	3	3	1.030.000.000	3	1.100.000.000	3	1.100.000.000	3	1.100.000.000	3	1.100.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	Bidang Angkutan Jalan JAWA TENGAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							6.451.690.000		7.283.190.000		4.593.190.000		6.938.190.000		26.283.190.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretapian	
			Meningkatnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B	Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B ***	%	69,85	69,99	70,14	6.073.500.000	70,28	6.905.000.000	70,43	3.515.000.000	70,58	6.560.000.000	70,72	25.905.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretapian	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ****							6.073.500.000		6.905.000.000		3.515.000.000		6.560.000.000		25.905.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretapian	
			Meningkatnya Jumlah Terminal Tipe B sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Presentase Keterpenuhan SPM Terminal Tipe B ****	%	51,56	52,24	53,48	6.073.500.000	54,72	6.905.000.000	55,96	3.515.000.000	57,2	6.560.000.000	58,44	25.905.000.000	Pokja Terminal Penumpang	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B *****							105.000.000		105.000.000		315.000.000		210.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B *****	Dokumen	2	1	1	105.000.000	1	105.000.000	3	315.000.000	2	210.000.000	1	105.000.000	Pokja Terminal Penumpang	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian KARANGANYAR PEKALONGAN TEMANGGUNG WONOGIRI
		Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							1.100.000.000		2.150.000.000		3.200.000.000		6.350.000.000		25.800.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****	Unit	1	1	1	1.100.000.000	2	2.150.000.000	1	3.200.000.000	3	6.350.000.000	3	25.800.000.000	Pokja Terminal Penumpang	BATANG Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian BREBES KARANGANYAR KOTA SEMARANG PURBALINGGA SUKOHARJO TEMANGGUNG
		Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang *****							4.868.500.000		4.650.000.000		0		0		0	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang *****	Unit	1	1	1	4.868.500.000	1	4.650.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Terminal Penumpang	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian PURWOREJO
			Meningkatnya total implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis ***	%	47,69	50,32	52,95	378.190.000	55,58	378.190.000	58,21	1.078.190.000	60,83	378.190.000	63,46	378.190.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi ****							378.190.000		378.190.000		1.078.190.000		378.190.000		378.190.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Meningkatnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ	Persentase implementasi dokumen RIJLLAJ ****	%	39,02	41,46	43,9	378.190.000	47,56	378.190.000	52,44	1.078.190.000	56,1	378.190.000	59,76	378.190.000	Pokja Perencanaan Transportasi	
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi *****							378.190.000		378.190.000		1.078.190.000		378.190.000		378.190.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi *****	Dokumen	2	2	2	378.190.000	3	378.190.000	4	1.078.190.000	3	378.190.000	3	378.190.000	Pokja Perencanaan Transportasi	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian JAWA TENGAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ***	%	19,98	20,98	22,04	105.000.000	23,15	105.000.000	24,32	105.000.000	25,53	105.000.000	26,83	105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ****	%	30,83	31,36	31,91	105.000.000	32,46	105.000.000	33,03	105.000.000	33,6	105.000.000	34,18	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksanany a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara *****	Unit	2	1	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A GROBOGAN SEMARANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ***	%	3,66	3,83	3,99	105.000.000	4,16	105.000.000	4,41	105.000.000	4,66	105.000.000	4,91	105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ****	%	39,06	39,56	40,06	105.000.000	40,56	105.000.000	41,06	105.000.000	41,56	105.000.000	42,06	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksanany a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara *****	Unit	1	1	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A BLORA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ***	%	40,87	42,95	45,11	525.000.000	47,37	525.000.000	49,74	525.000.000	52,23	525.000.000	54,86	525.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ****							525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ****	%	28,19	28,32	28,44	525.000.000	28,56	525.000.000	28,69	525.000.000	28,82	525.000.000	28,94	525.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksanany a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara *****	Unit	3	5	5	525.000.000	5	525.000.000	5	525.000.000	5	525.000.000	5	525.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A BOYOLALI KARANGANYAR SRAGEN SUKOHARJO WONOGIRI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ***	%	7,28	7,66	8,04	105.000.000	8,43	105.000.000	8,86	105.000.000	9,3	105.000.000	9,77	105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ****	%	37,53	37,92	38,31	105.000.000	38,71	105.000.000	39,11	105.000.000	39,52	105.000.000	39,93	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksanany a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilita si dan terpelihara *****	Unit	1	1	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A MAGELANG PURWOREJO TEMANGGUNG
		PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase pengunjun g terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ***	%	39,45	41,45	43,53	105.000.000	45,74	105.000.000	48,02	105.000.000	50,44	105.000.000	52,99	105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ****	%	31,31	31,44	31,71	105.000.000	31,71	105.000.000	31,84	105.000.000	31,98	105.000.000	32,12	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksanany a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilita si dan terpelihara *****	Unit	1	1	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A BANJARNEGARA PURBALINGGA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ***	%	25,5	26,76	28,16	210.000.000	29,58	210.000.000	31,05	210.000.000	32,67	210.000.000	34,3	210.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ****							210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ****	%	42,27	42,6	42,94	210.000.000	43,29	210.000.000	43,63	210.000.000	43,98	210.000.000	44,33	210.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) *****							210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksanany a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilita si dan terpelihara *****	Unit	1	2	2	210.000.000	2	210.000.000	2	210.000.000	2	210.000.000	2	210.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A BATANG BREBES PEKALONGAN
		PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							119.805.449.000		130.264.952.000		162.528.595.000		187.240.362.000		200.701.462.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya Jumlah Penduduk Terlayani (Trans Jateng)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng) ***	%	4,29	4,4	4,42	119.805.449.000	4,47	130.264.952.000	4,51	162.528.595.000	4,57	187.240.362.000	4,62	200.701.462.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ****							974.690.000		1.904.690.000		7.814.690.000		7.524.690.000		5.424.690.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Bertambahnya Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Persentase Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi ****	%	27,03	27,58	28,06	974.690.000	29,17	1.904.690.000	32,03	7.814.690.000	34,26	7.524.690.000	36,49	5.424.690.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi *****							974.690.000		1.904.690.000		7.814.690.000		7.524.690.000		5.424.690.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia *****	Unit	6	6	6	974.690.000	14	1.904.690.000	36	7.814.690.000	28	7.524.690.000	28	5.424.690.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A BANYUMAS BATANG CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KENDAL KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SEMARANG KUDUS MAGELANG PATI PURBALINGGA PURWOREJO SRAGEN SUKOHARJO TEMANGGUNG WONOGIRI
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							118.830.759.000		128.360.262.000		154.713.905.000		179.715.672.000		195.276.772.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan	Jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan ****	Orang	9.499.742	9.501.790	9.557.771	118.830.759.000	9.774.613	128.360.262.000	10.617.501	154.713.905.000	11.830.758	179.715.672.000	12.553.570	195.276.772.000	SEKSI OPERASIONAL	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							118.830.759.000		128.360.262.000		154.713.905.000		179.715.672.000		195.276.772.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****	Unit	112	115	115	118.830.759.000	129	128.360.262.000	157	154.713.905.000	171	179.715.672.000	185	195.276.772.000	SEKSI OPERASIONAL	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A BANYUMAS BATANG CILACAP DEMAK GROBOGAN JEPARA KENDAL KOTA MAGELANG KOTA SURAKARTA KUDUS MAGELANG PATI PEKALONGAN PURBALINGGA PURWOREJO SEMARANG SRAGEN SUKOHARJO TEMANGGUNG WONOGIRI
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN ***							1.126.390.000		1.479.890.000		1.382.890.000		1.276.890.000		762.890.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP ***	Angka	0,381	0,402	0,472	1.126.390.000	0,534	1.479.890.000	0,596	1.382.890.000	0,652	1.276.890.000	0,715	762.890.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan ****							326.890.000		326.890.000		326.890.000		326.890.000		326.890.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Bertambahnya dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya	Persentase dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya ****	%	42,42	42,42	51,52	326.890.000	57,58	326.890.000	63,64	326.890.000	69,7	326.890.000	75,76	326.890.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *****							326.890.000		326.890.000		326.890.000		326.890.000		326.890.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Serizinan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan *****	Unit	2	4	3	326.890.000	2	326.890.000	2	326.890.000	2	326.890.000	2	326.890.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	BATANG Bidang Pelayaran BREBES KENDAL KOTA SURAKARTA SUKOHARJO TEGAL
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas ****							75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi ****	%	36,69	46,32	56,84	75.000.000	67,37	100.000.000	77,89	100.000.000	88,42	100.000.000	98,95	100.000.000	Pokja Angkutan Laut	
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *****							75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *****	Dokumen	33	38	30	75.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	Pokja Angkutan Laut	Bidang Pelayaran CILACAP JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA SEMARANG
		Pembanguna n, Penerbitan Izin Pembanguna n dan Pengoperasia n Pelabuhan Pengumpan Regional ****							85.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubung an - Bidang Pelayaran	
			Bertambahny a Berth occupancy ratio	Berth occupancy ratio ****	%	25,9	19,64	20,44	85.000.000	21,24	100.000.000	22,04	100.000.000	22,84	100.000.000	23,64	100.000.000	Pokja Kepelabuh anan	
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembanguna n dan Pengoperasia n Pelabuhan Pengumpan Regional *****							85.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perhubung an - Bidang Pelayaran	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian *****	Unit	8	8	8	85.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	Pokja Kepelabuhanan	Bidang Pelayaran CILACAP PATI PEKALONGAN REMBANG SEMARANG
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****							639.500.000		953.000.000		856.000.000		750.000.000		236.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Bertambahnya Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	Persentase Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi ****	%	47,5	52,5	60	639.500.000	67,5	953.000.000	75	856.000.000	80	750.000.000	87,5	236.000.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							70.000.000		130.000.000		70.000.000		0		0	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Tersedianya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan *****	Laporan	1	1	1	70.000.000	3	130.000.000	1	70.000.000	N/A	0	N/A	0	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	BATANG Bidang Pelayaran BREBES KENDAL KOTA SURAKARTA SUKOHARJO TEGAL

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							533.000.000		783.000.000		586.000.000		550.000.000		36.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun *****	Unit	N/A	1	1	533.000.000	1	783.000.000	1	586.000.000	1	550.000.000	1	36.000.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	BATANG Bidang Pelayaran BREBES KENDAL KOTA SURAKARTA SUKOHARJO TEGAL
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							0		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Terlaksanannya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Bidang Pelayaran JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							36.500.000		40.000.000		0		0		0	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran	
			Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia *****	Unit	28	25	18	36.500.000	28	40.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Bidang Pelayaran BREBES KOTA SURAKARTA SUKOHARJO TEGAL
	Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah **								12.209.879.000		18.112.473.000		29.031.602.000		31.369.782.000		46.591.007.000	Dinas Perhubungan	
				Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi **	%	99,983	99,984	99,984	12.209.879.000	99,984	18.112.473.000	99,985	29.031.602.000	99,985	31.369.782.000	99,985	46.591.007.000	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							5.059.428.000		6.373.329.000		11.303.218.000		12.846.323.000		28.919.613.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Meningkatnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi ***	%	5,78	6,36	6,94	4.759.428.000	7,51	6.073.329.000	8,09	11.003.218.000	8,67	12.546.323.000	9,25	28.619.613.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ****							4.262.683.000		5.546.584.000		10.471.473.000		12.039.578.000		28.092.868.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya pemenuhan perlengkapan jalan terpasang	Persentase perlengkapan jalan terpenuhi ****	%	63,63	63,9	64,24	4.262.683.000	66,47	5.546.584.000	69,1	10.471.473.000	72,93	12.039.578.000	77,21	28.092.868.000	Pokja Rekayasa Lalu Lintas Jalan	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi *****							4.262.683.000		5.546.584.000		10.471.473.000		12.039.578.000		28.092.868.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia *****	Unit	154	513	310	4.262.683.000	622	5.546.584.000	800	10.471.473.000	863	12.039.578.000	1608	28.092.868.000	Pokja Rekayasa Lalu Lintas Jalan	Bidang Lalu Lintas Jalan JAWA TENGAH
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ****							421.745.000		451.745.000		456.745.000		431.745.000		451.745.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Tercapainya penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng ****	Kabupaten /Kota	15	17	19	75.000.000	19	75.000.000	21	75.000.000	21	75.000.000	23	75.000.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Terlaksanany a Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *****	Dokumen	30	30	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	Bidang Lalu Lintas Jalan JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya jumlah rekomendasi hasil Forum LLAJ	Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ ****	Dokumen	12	12	12	346.745.000	12	376.745.000	12	381.745.000	12	356.745.000	12	376.745.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi *****							346.745.000		376.745.000		381.745.000		356.745.000		376.745.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Terlaksanany a Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi *****	Laporan	6	6	13	346.745.000	13	376.745.000	13	381.745.000	13	356.745.000	13	376.745.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Bidang Lalu Lintas Jalan JAWA TENGAH
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi ****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin dibandingkan dengan jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarka	Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin ****	%	70,18	71,66	73,13	75.000.000	74,61	75.000.000	76,08	75.000.000	77,56	75.000.000	79,03	75.000.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	
		Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin *****							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Ditetapkanny a Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan *****	Dokumen	31	32	33	75.000.000	34	75.000.000	35	75.000.000	36	75.000.000	37	75.000.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	Bidang Lalu Lintas Jalan JAWA TENGAH
			Meningkatnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah ***	%	97,98	98,01	98,03	300.000.000	98,05	300.000.000	98,08	300.000.000	98,1	300.000.000	98,12	300.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ****							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseline Tahun 2024 (R)	Baseline Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bertambahnya Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah ****	Unit	313927	317908	317984	300.000.000	318061	300.000.000	318137	300.000.000	318213	300.000.000	318290	300.000.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi *****							250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi *****	Laporan	135	135	135	250.000.000	135	250.000.000	135	250.000.000	135	250.000.000	135	250.000.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Bidang Lalu Lintas Jalan JAWA TENGAH
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****	Laporan	66	66	66	50.000.000	66	50.000.000	66	50.000.000	66	50.000.000	66	50.000.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Bidang Lalu Lintas Jalan JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							754.043.000		1.667.878.000		2.360.398.000		2.383.168.000		2.397.138.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ***	%	3	3	3	543.418.000	3	1.457.253.000	3	2.149.773.000	3	2.172.543.000	3	2.186.513.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ****							543.418.000		1.457.253.000		2.149.773.000		2.172.543.000		2.186.513.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Meningkatnya rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ****	%	11,11	16,67	33,33	543.418.000	61,11	1.457.253.000	77,78	2.149.773.000	88,89	2.172.543.000	100	2.186.513.000	SEKSI LALU LINTAS	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****							145.680.000		145.680.000		145.680.000		145.680.000		145.680.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	56	56	56	145.680.000	56	145.680.000	56	145.680.000	56	145.680.000	56	145.680.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A DEMAK GROBOGAN KENDAL KOTA SEMARANG SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				*****															
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *****							397.738.000		1.311.573.000		2.004.093.000		2.026.863.000		2.040.833.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan *****	Unit	1	1	2	397.738.000	5	1.311.573.000	4	2.004.093.000	2	2.026.863.000	2	2.040.833.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A DEMAK GROBOGAN KENDAL KOTA SEMARANG SEMARANG
			Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ***	%	52,43	54,84	57,12	210.625.000	59,3	210.625.000	61,36	210.625.000	63,32	210.625.000	65,19	210.625.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ****							210.625.000		210.625.000		210.625.000		210.625.000		210.625.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Bertambahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ****	Unit	2241	2241	2241	210.625.000	2241	210.625.000	2241	210.625.000	2241	210.625.000	2241	210.625.000	SEKSI ANGKUTAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****							185.625.000		185.625.000		185.625.000		185.625.000		185.625.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksanany a Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantaua n Terminal *****	Lapor an	36	36	36	185.625.000	36	185.625.000	36	185.625.000	36	185.625.000	36	185.625.000	SEKSI ANGKUTA N	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A DEMAK GROBOGAN KOTA SEMARANG
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
			Terlaksanany a Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantaua n Sistem Manajemen Keselamata n Perusahaa n Angkutan Umum *****	Lapor an	2	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SEKSI ANGKUTA N	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A JAWA TENGAH
		PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							678.295.000		1.314.820.00 0		2.258.470.000		2.521.480.000		2.511.140.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ***	%	3	3	3	562.345.000	3	1.198.870.00 0	3	2.142.520.000	3	2.405.530.000	3	2.395.190.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseline Tahun 2024 (R)	Baseline Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ****							562.345.000		1.198.870.000		2.142.520.000		2.405.530.000		2.395.190.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Meningkatnya rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ****	%	31,25	37,5	43,75	562.345.000	50	1.198.870.000	68,75	2.142.520.000	87,5	2.405.530.000	100	2.395.190.000	SEKSI LALU LINTAS	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****							121.680.000		121.680.000		121.680.000		121.680.000		121.680.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****	Laporan	46	46	46	121.680.000	46	121.680.000	46	121.680.000	46	121.680.000	46	121.680.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A BLORA JEPARA KUDUS PATI REMBANG
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *****							440.665.000		1.077.190.000		2.020.840.000		2.283.850.000		2.273.510.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan *****	Unit	1	1	1	440.665.000	1	1.077.190.000	3	2.020.840.000	3	2.283.850.000	2	2.273.510.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A BLORA JEPARA KUDUS PATI REMBANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ***	%	84,62	85,41	86,2	115.950.000	86,92	115.950.000	87,63	115.950.000	88,26	115.950.000	88,9	115.950.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ****							115.950.000		115.950.000		115.950.000		115.950.000		115.950.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Bertambahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A ****	Unit	1261	2241	1261	115.950.000	1261	115.950.000	1261	115.950.000	1261	115.950.000	1261	115.950.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****							95.950.000		95.950.000		95.950.000		95.950.000		95.950.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
			Terlaksanaanya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****	Laporan	36	36	36	95.950.000	36	95.950.000	36	95.950.000	36	95.950.000	36	95.950.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A BLORA
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****	Laporan	2	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A JAWA TENGAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							1.143.105.000		1.690.640.000		2.613.720.000		2.792.470.000		2.806.110.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ***	%	3	3	3	738.455.000	3	1.285.990.000	3	2.209.070.000	3	2.387.820.000	3	2.401.460.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ****							738.455.000		1.285.990.000		2.209.070.000		2.387.820.000		2.401.460.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Meningkatnya rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ****	%	22,22	33,33	55,56	738.455.000	66,67	1.285.990.000	77,78	2.209.070.000	88,89	2.387.820.000	100	2.401.460.000	SEKSI LALU LINTAS	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****							198.480.000		198.480.000		198.480.000		198.480.000		198.480.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksanany a Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****	Lapor an	78	78	78	198.480.000	78	198.480.000	78	198.480.000	78	198.480.000	78	198.480.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A BOYOLALI KARANGANYAR KLATEN KOTA SURAKARTA SRAGEN SUKOHARJO WONOGIRI
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *****							539.975.000		1.087.510.000		2.010.590.000		2.189.340.000		2.202.980.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksanany a Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkap an Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanak an Pengadaan dan Pemasanga n *****	Unit	2	1	2	539.975.000	1	1.087.510.000	1	2.010.590.000	1	2.189.340.000	1	2.202.980.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A BOYOLALI KARANGANYAR KLATEN KOTA SURAKARTA SRAGEN SUKOHARJO WONOGIRI
			Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase Hasil rekomenda si ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah III Kelas A ***	%	79,85	80,87	81,84	404.650.000	82,76	404.650.000	83,63	404.650.000	84,45	404.650.000	85,24	404.650.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ****							404.650.000		404.650.000		404.650.000		404.650.000		404.650.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Bertambahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ****	Unit	6199	6199	6889	404.650.000	6199	404.650.000	6199	404.650.000	6199	404.650.000	6199	404.650.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****							363.800.000		363.800.000		363.800.000		363.800.000		363.800.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksanany a Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****	Lapor an	36	36	36	363.800.000	36	363.800.000	36	363.800.000	36	363.800.000	36	363.800.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A BOYOLALI KARANGANYAR SRAGEN SUKOHARJO WONOGIRI
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							40.850.000		40.850.000		40.850.000		40.850.000		40.850.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
			Terlaksanany a Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****	Lapor an	2	2	2	40.850.000	2	40.850.000	2	40.850.000	2	40.850.000	2	40.850.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseline Tahun 2024 (R)	Baseline Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							779.005.000		1.531.030.000		2.456.640.000		2.765.080.000		2.529.020.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ***	%	3	3	3	581.205.000	3	1.333.230.000	3	2.258.840.000	3	2.567.280.000	3	2.331.220.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ****							581.205.000		1.333.230.000		2.258.840.000		2.567.280.000		2.331.220.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Meningkatnya rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ****	%	13,33	20	33,33	581.205.000	53,33	1.333.230.000	66,67	2.258.840.000	93,33	2.567.280.000	100	2.331.220.000	SEKSI LALU LINTAS	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****							126.480.000		126.480.000		126.480.000		126.480.000		126.480.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksanany a Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	56	56	48	126.480.000	48	126.480.000	48	126.480.000	48	126.480.000	48	126.480.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A KEBUMEN MAGELANG PURWOREJO TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				*****															
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *****							454.725.000		1.206.750.000		2.132.360.000		2.440.800.000		2.204.740.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan *****	Unit	2	1	1	454.725.000	3	1.206.750.000	2	2.132.360.000	2	2.440.800.000	1	2.204.740.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A KEBUMEN MAGELANG PURWOREJO TEMANGGUNG
			Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ***	%	92,05	92,45	92,83	197.800.000	93,19	197.800.000	93,54	197.800.000	93,87	197.800.000	94,19	197.800.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ****							197.800.000		197.800.000		197.800.000		197.800.000		197.800.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Bertambahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ****	Unit	6889	6889	6889	197.800.000	6889	197.800.000	6889	197.800.000	6889	197.800.000	6889	197.800.000	SEKSI ANGKUTAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****							167.800.000		167.800.000		167.800.000		167.800.000		167.800.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksanany a Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantaua n Terminal *****	Lapor an	36	36	36	167.800.000	36	167.800.000	36	167.800.000	36	167.800.000	36	167.800.000	SEKSI ANGKUTA N	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A MAGELANG PURWOREJO TEMANGGUNG
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
			Terlaksanany a Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantaua n Sistem Manajemen Keselamata n Perusahaa n Angkutan Umum *****	Lapor an	2	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTA N	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A JAWA TENGAH KEBUMEN KOTA MAGELANG MAGELANG PURWOREJO TEMANGGUNG
		PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							790.005.000		1.555.670.000		2.575.990.000		2.547.610.000		2.538.480.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ***	%	3	3	3	594.505.000	3	1.360.170.000	3	2.380.490.000	3	2.352.110.000	3	2.342.980.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ****							594.505.000		1.360.170.000		2.380.490.000		2.352.110.000		2.342.980.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Meningkatnya rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ****	%	25	50	75	594.505.000	100	1.360.170.000	100	2.380.490.000	100	2.352.110.000	100	2.342.980.000	SEKSI LALU LINTAS	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****							169.680.000		169.680.000		169.680.000		169.680.000		169.680.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksanany a Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****	Lapor an	58	58	66	169.680.000	66	169.680.000	66	169.680.000	66	169.680.000	66	169.680.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A BANJARNEGARA BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA WONOSOBO
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *****							424.825.000		1.190.490.000		2.210.810.000		2.182.430.000		2.173.300.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksanany a Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan *****	Unit	1	1	1	424.825.000	1	1.190.490.000	1	2.210.810.000	1	2.182.430.000	1	2.173.300.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A BANJARNEGARA BANYUMAS CILACAP PURBALINGGA WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ***	%	85,68	86,4	87,09	195.500.000	87,74	195.500.000	88,37	195.500.000	88,97	195.500.000	89,53	195.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ****							195.500.000		195.500.000		195.500.000		195.500.000		195.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Bertambahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A ****	Unit	3353	3353	3353	195.500.000	3353	195.500.000	3353	195.500.000	3353	195.500.000	3353	195.500.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****							165.500.000		165.500.000		165.500.000		165.500.000		165.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
			Terlaksanaanya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****	Laporan	36	36	36	165.500.000	36	165.500.000	36	165.500.000	36	165.500.000	36	165.500.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A BANJARNEGARA PURBALINGGA
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****	Laporan	2	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A BANJARNEGARA BANYUMAS CILACAP JAWA TENGAH PURBALINGGA WONOSOBO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ***							812.987.000		1.506.050.000		2.602.380.000		2.471.260.000		2.778.270.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ***	%	3	3	3	560.997.000	3	1.254.060.000	3	2.350.390.000	3	2.219.270.000	3	2.526.280.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ****							560.997.000		1.254.060.000		2.350.390.000		2.219.270.000		2.526.280.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Meningkatnya rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ****	%	33,33	37,5	45,83	560.997.000	58,33	1.254.060.000	66,67	2.350.390.000	70,83	2.219.270.000	100	2.526.280.000	SEKSI LALU LINTAS	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****							136.080.000		136.080.000		136.080.000		136.080.000		136.080.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksanany a Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasa n dan Pengendali an Efektivitas Pelaksanaa n Kebijakan untuk Jalan Provinsi *****	Lapor an	52	52	52	136.080.000	52	136.080.000	52	136.080.000	52	136.080.000	52	136.080.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A BATANG BREBES PEKALONGAN PEMALANG TEGAL
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *****							424.917.000		1.117.980.000		2.214.310.000		2.083.190.000		2.390.200.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksanany a Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkap an Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanak an Pengadaan dan Pemasanga n *****	Unit	5	1	1	424.917.000	3	1.117.980.000	3	2.214.310.000	1	2.083.190.000	7	2.390.200.000	SEKSI LALU LINTAS	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A BATANG BREBES PEKALONGAN PEMALANG TEGAL
			Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase Hasil rekomenda si ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubung an Wilayah VI Kelas A ***	%	87,43	88,06	88,66	251.990.000	89,23	251.990.000	89,77	251.990.000	90,29	251.990.000	90,77	251.990.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ****							251.990.000		251.990.000		251.990.000		251.990.000		251.990.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Bertambahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ****	Unit	3500	3500	3500	251.990.000	3500	251.990.000	3500	251.990.000	3500	251.990.000	3500	251.990.000	SEKSI ANGKUTAN	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****							221.990.000		221.990.000		221.990.000		221.990.000		221.990.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksanany a Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal *****	Lapor an	36	36	36	221.990.000	36	221.990.000	36	221.990.000	36	221.990.000	36	221.990.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A BATANG BREBES PEKALONGAN
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
			Terlaksanany a Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum *****	Lapor an	2	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A JAWA TENGAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN ***							2.193.011.000		2.473.056.000		2.860.786.000		3.042.391.000		2.111.236.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satu-an	Baseli-ne Tahun 2024 (R)	Baseli-ne Tahun 2025 (T)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gungjawab	Lokasi
								2026		2027		2028		2029		2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
																		Perkeretaapian	
			Meningkatnya perlintasan sebidang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar	Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan ***	%	4	4	28	2.193.011.000	36	2.473.056.000	60	2.860.786.000	88	3.042.391.000	92	2.111.236.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian ****							2.193.011.000		2.473.056.000		2.860.786.000		3.042.391.000		2.111.236.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Bertambahnya perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan Fasilitas keselamatan	Persentase realisasi rencana induk perkeretaapian ****	%	57,4	59,3	70,48	2.193.011.000	72,71	2.473.056.000	85,71	2.860.786.000	95,04	3.042.391.000	97,7	2.111.236.000	Pokja Perkeretaapian	
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian *****							2.193.011.000		2.473.056.000		2.860.786.000		3.042.391.000		2.111.236.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
			Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian *****	Laporan	5	3	7	2.193.011.000	5	2.473.056.000	5	2.860.786.000	7	3.042.391.000	2	2.111.236.000	Pokja Perkeretaapian	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian JAWA TENGAH

Sumber Dinas Perhubungan 2025

Keterangan:

Kolom (1) dan (2) diisi tujuan dan sasaran

Kolom (3) diisi dengan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah (catatan: program sama dengan program dalam RPJMD)

Kolom (4) diisi dengan outcome/ kinerja program dan output/ kinerja kegiatan/ sub kegiatan (catatan outcome program sama dengan outcome program dalam RPJMD)

Kolom (5) diisi indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan (catatan: IK tujuan, sasaran, program sama dengan yang tertuang dalam RPJMD)

Kolom (8) s.d ((17) diisi target kinerja dan pagu indikatif (catatan: target tujuan, sasaran, program, dan pagu per program sama dengan yang tertuang dalam RPJMD)
Kolom (18) diisi unit kerja sampai tingkat eselon III/IV
Kolom (19) diisi lokasi sasaran sampai dengan tingkat desa, atau lokasi tertentu

Tabel IV.2. Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa					
		Memfasilitasi kebutuhan rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas melalui penyelenggaraan rapat koordinasi / konsultasi / sinkronisasi. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat (Kemenhub cq. KSOP) untuk mendorong peningkatan kinerja Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu keluar perdagangan.	2025 : 1 Kegiatan 2026 : 1 Kegiatan 2027 : 1 Kegiatan 2028 : 1 Kegiatan 2029 : 1 Kegiatan 2030 : 1 Kegiatan	• Program Pengelolaan Pelayaran • Keg Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional • Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Bidang Pelayaran	• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter					
	Peningkatan Kualitas Jalan Provinsi baik di Wilayah Perbatasan maupun di Kabupaten / Desa					

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Provinsi	Pemenuhan perlengkapan jalan berupa pemasangan baru lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan provinsi yang mempunyai nilai strategis tinggi dan secara teknis dapat dilaksanakan pemasangan LPJU (tersedia lahan dan jaringan tegangan rendah (JTR) PLN Diprioritaskan pada ruas jalan provinsi yang volume lalu lintas nya tinggi, memiliki nilai strategis mendukung perekonomian (akses pariwisata, jalur logistik dan perbatasan) dan yang berpotensi mengurangi frekuensi kejadian kecelakaan lalu lintas serta ruas jalan yang sudah dinyatakan tuntas penanganannya secara kebinamargaan.	2025 : 402 Unit 2026 : 200 Unit 2027 : 200 Unit 2028 : 368 Unit 2029 : 430 Unit 2030 : 1.172 Unit	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Bidang Lalu Lintas	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Peremajaan / penggantian LPJU yang kinerjanya sudah menurun berupa penggantian suku cadang sesuai kebutuhan	2025 : 323 Unit 2026 : 283 Unit 2027 : 600 Unit 2028 : 600 Unit 2029 : 600 Unit 2030 : 600 Unit	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi • Sub Keg. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Dalam Rangka Manajemen dan	• Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A • Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A • Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana • Dinas Energi dan Sumber Daya

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Rekayasa Lalu Lintas	III Kelas A • Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A • Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A • Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Mineral • Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penanganan kerusakan LPJU melalui pemenuhan kebutuhan jumlah armada kendaraan (crane/skylift) untuk pemeliharan LPJU	2025 : 1 Unit 2026 : 1 Unit 2027 : 1 Unit 2028 : 1 Unit 2029 : 1 Unit 2030 : 1 Unit	• Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi • Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	• Sekretariat Dinas Perhubungan	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)					
	BLUD Pengelola Trans Jateng	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola Trans Jateng dari semula UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Balai Transportasi Jawa Tengah menjadi PPK BLUD (Pola	2025 : Kajian 2026 : Realisasi	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu)	• Bidang Angkutan	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah)		Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi		
	Kerjasama CSR dan BUMN/BUMD	Peningkatan kerjasama pembiayaan sarana dan prasarana pendukung Trans Jateng yang bersumber dari CSR BUMN/BUMD dan swasta	2025 : 1 Kegiatan 2026 : 1 Kegiatan 2027 : 1 Kegiatan 2028 : 1 Kegiatan 2029 : 1 Kegiatan 2030 : 1 Kegiatan	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	• Balai Transportasi Kelas A	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Moderanisasi armada Trans Jateng	Penambahan armada dan peremajaan Bus Trans Jateng yang sudah memasuki batas usia kendaraan sesuai ketentuan/regulasi serta kondisi laik jalan	2027 : 18 Bus (Koridor Bawen : 18 bus) 2028 : 21 Bus (koridor Bawen : 7 bus , 14 koridor Purwokerto) 2029 : 14 bus (14 Bus koridor Kendal) 2030 : 31 Bus (peremajaan koridor Kutoarjo - Magelang : 14 bus dan Solo-Sumberlawang : 14 Bus Semarang – Bawen : 3 Bus)	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	• Balai Transportasi Kelas A	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Moderanisasi sistem Trans Jateng	Pembangunan command center untuk memantau dan menjamin kualitas serta digitalisasi layanan Trans Jateng	2028 : Pembangunan Gedung Command Center. 2029 : Lanjutan Comand Center (Peralatan dan Perlengkapan)	• Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi • Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• Sekretariat Dinas Perhubungan	• Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				• Sub Keg. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan
		Peningkatan pilihan pembayaran secara digital dan/atau cashless	2025 : 7% Pengguna menggunakan cashless 2026 : 7,2 % Pengguna menggunakan cashless 2027 : 7,4% Pengguna menggunakan cashless 2028 : 7,6% Pengguna menggunakan cashless 2029 : 7,8% Pengguna menggunakan cashless 2027 : 8,0% Pengguna menggunakan cashless	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	• Balai Transportasi Kelas A	• Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Inisiasi layanan Trans Jateng "Executive"	2026 : Kajian FS dan ATP / WTP 2027 : Uji coba, 1 bus eksisting, 2 rit per hari (senin - jumat) selama 3 bulan di 1 koridor (Smrg - Bawen), dan proses penyusunan SK Gubernur terkait tarif eksekutif 2028 : Operasionalisasi Tahap I, 2 bus baru, 2 rit per hari (senin - jumat) selama 1 tahun di 1 koridor (Smrg - Bawen) 2029 : Operasionalisasi Tahap II, 4 bus baru, 2 rit	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Program Penyelengg. LLAJ	• Bidang Angkutan • Balai Transportasi Kelas A	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			per hari (senin - jumat) selama 1 tahun di 1 koridor (Smrg - Bawen) 2030 : Operasionalisasi Tahap III, 6 bus baru, 2 rit per hari (senin - jumat) selama 1 tahun di 1 koridor (Smrg - Bawen)	• Keg. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi		Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Pembangunan halte portable	2026 : Pembangunan halte portable sejumlah 6 unit untuk pentahapan pemenuhan halte koridor lama Trans Jateng. 2027 : Pembangunan halte portable sejumlah 6 unit untuk pentahapan pemenuhan halte koridor lama Trans Jateng dan untuk pembukaan 1 koridor Gelangmanggung 2028 : Pembangunan halte portable sejumlah 20 unit untuk pentahapan pemenuhan halte koridor lama Trans Jateng dan Pembukaan 2 koridor baru Jekuti & Petanglong 2029 : Pembangunan halte portable sejumlah 20 unit untuk pentahapan pemenuhan halte koridor lama Trans Jateng.-	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	• Balai Transportasi Kelas A	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembangunan Halte untuk pembukaan 1 koridor baru (Cibalingmas) – 2030 : Pembangunan halte portable sejumlah 20 unit untuk pentahapan pemenuhan halte koridor lama Trans Jateng dan untuk pembukaan 1 koridor baru (Demak) serta pembangunan ruang tunggu 1 Lokasi			
		Pembangunan ruang tunggu penumpang Bus Trans Jateng di terminal tipe B yang representatif dan dilengkapi dengan Public Transport Information System (PTIS)	2028 : Pembangunan Ruang Tunggu di Terminal Banyuputih dan Pembangunan Transit Hub di Kab Pati di lengkapi dengan PTIS 2029 : Pembangunan ruang tunggu pada 4 Lokasi (Pembangunan ruang tunggu di Terminal Penggaron (integrasi Trans Jateng dan Trans Semarang), Pembangunan ruang tunggu di Terminal Sukoharjo dan Madureso yang dilengkapi dengan PTIS dan Pembangunan ruang tunggu di Terminal Kroya dilengkapi dengan PTIS) 2030 : Pembangunan ruang tunggu di Terminal Purbalingga dilengkapi dengan PTIS	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	• Balai Transportasi Kelas A	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi					
		Pengembangan cakupan layanan (penambahan koridor, ritasi, jam operasional dan perpanjangan koridor) Trans Jateng	2025 : Pra FS WP Jekuti 2026 : DED dan ATP WTP Trans Jateng Koridor Kab. Magelang – Kota Magelang – Kab. Temanggung; Masterplan Trans Jateng Jekuti DED Trans Jateng Petanglong 2027 : Operasional WP Gelangmanggung DED Trans Jateng Jekuti ATP / WTP Trans Jateng Jekuti ATP / WTP Trans Jateng Petanglong2028 : Operasional WP Petanglong Operasional WP Jekuti DED Trans Jateng Cibalingmas ATP / WTP Trans Jateng Cibalingmas 2029 : Operasional WP Cibalingmas FS (Sosial dan Teknis) & DED Semarang – Demak ATP / WTP Trans Jateng Semarang – Demak 2030 : Operasional Trans Jateng Semarang – Demak	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Program Penyelengg. LLAJ • Keg. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	• Balai Transportasi Kelas A • Bidang Angkutan	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global					
		Fasilitasi peningkatan kualitas, kapasitas dan kinerja pelabuhan dan bandara perintis dalam mendukung aktivitas perekonomian	2025 : 2 Kegiatan 2026 : 2 Kegiatan 2027 : 2 Kegiatan 2028 : 2 Kegiatan 2029 : 2 Kegiatan 2030 : 2 Kegiatan	• Program Pengelolaan Pelayaran • Keg Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional • Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dan; • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Lalan (LLAJ) • Kegiatan Pemetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi • Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	• Bidang Pelayaran • Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api					
		Fasilitasi revitalisasi jalur non aktif kereta api dan mengusulkan perpanjangan layanan kereta api komunter	2025 : 1 Kegiatan 2026 : 1 Kegiatan 2027 : 1 Kegiatan 2028 : 1 Kegiatan 2029 : 1 Kegiatan 2030 : 1 Kegiatan	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Lalan (LLAJ) • Kegiatan Pemetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi • Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	• Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan •
7	Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional					
		Fasilitasi kegiatan dengan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk mendorong Bandara A. Yani Semarang dan Adi Soemarmo menjadi Bandara Internasional Status Bandara sudah internasional mendasarkan SK Menhub No. KM 37 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional	2025 : Bandara A. Yani Semarang dan Adi Soemarmo ditetapkan menjadi Bandara Internasional	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Lalan (LLAJ) • Kegiatan Pemetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi • Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	• Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	• Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Penurunan tarif Trans Jateng Rp. 1000,-	Revisi SK Gubernur terkait Penetapan Tarif sebagaimana SK Gubernur No. 100.3.3.1/124 Tahun 2025 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng tanggal 30 April 2025. Tarif Khusus : Rp. 1.000,- (Pelajar, Veteran, Buruh, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas) Tafir Umum : Rp. 5.000,- (Penumpang Umum).	2025 : Penetapan Keputusan Gubernur Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Lalan (LLAJ) • Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	• Balai Transportasi Kelas A	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Sumber Dinas Perhubungan 2025

Keterangan:

Kolom (2) 136 Program Daerah yang didukung oleh perangkat daerah;

Kolom (3) rencana aktivitas riil yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan 136 Program Daerah;

Kolom (4) output/target/volume yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun perencanaan;

Kolom (5) program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang mendukung program daerah.

A. Penjabaran Program 136 Program Daerah yang didukung oleh perangkat daerah

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan

Dalam rangka mengatasi tingginya angka korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan langkah strategis dan berkelanjutan. Berdasarkan data periode tahun 2020–2024, tercatat rata-rata sekitar 4.000 korban meninggal dunia setiap tahun, atau setara dengan 11 orang per hari. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan keselamatan lalu lintas harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan transportasi daerah.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menetapkan strategi utama berupa pemenuhan perlengkapan jalan, khususnya melalui pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas-ruas jalan provinsi serta penggantian LPJU yang mengalami kerusakan. Intervensi ini diharapkan mampu menurunkan risiko kecelakaan, meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.

Arah kebijakan penentuan lokasi intervensi pemasangan LPJU diselaraskan dengan tema pembangunan Jawa Tengah setiap tahunnya, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahun 2026 Fokus pada jalur distribusi hasil produksi pangan, terutama di daerah penghasil beras terbesar di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, serta daerah sentra pangan lainnya;
2. Tahun 2027 Fokus pada jalur menuju destinasi wisata unggulan dan geopark, meliputi Kawasan Wisata Super Prioritas Borobudur, Kawasan Wisata Dieng, Kawasan Wisata Tawangmangu, Kawasan Wisata Kaliangkrik (Nepal van Java), serta beberapa kawasan Geopark yang ada di Jawa Tengah;
3. Tahun 2028 Fokus pada jalur kawasan industri, terutama kawasan industri strategis berskala nasional di sepanjang Pantura Jawa Tengah, seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Kendal (KIK), serta wilayah industri potensial lainnya;
4. Tahun 2029–2030 Fokus pada peningkatan konektivitas antarwilayah yang memerlukan intervensi LPJU untuk mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat.

Melalui pendekatan bertahap ini, diharapkan tidak hanya tercapai penurunan angka kecelakaan lalu lintas, tetapi juga terwujud peningkatan kualitas pelayanan transportasi, konektivitas wilayah, serta pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara berkelanjutan.

2. Modernisasi Trans Jateng

Selain itu, dalam rangka mendukung aksi Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte). Pertama, terdapat peningkatan kapasitas kelembagaan Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang direncanakan akan diterapkan pada Balai Transportasi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah, berupa penerapan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem BLUD pada Balai Transportasi Jawa Tengah bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Sampai dengan saat ini telah dioperasionalkan sebanyak 7 (tujuh) koridor Trans Jateng.

Kedua, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pengguna, modernisasi armada Trans Jateng menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Modernisasi ini mencakup peningkatan teknologi mesin (dari Euro 2 menjadi Euro 4) guna menunjang efisiensi dan keandalan operasional, serta pembaruan sistem interior armada yang dilengkapi dengan fitur keamanan seperti CCTV. Dengan peningkatan tersebut, diharapkan masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan layanan Trans Jateng sebagai moda transportasi pilihan.

Ketiga, guna memperluas aksesibilitas informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di titik keberangkatan, dilakukan pula modernisasi halte dan ruang tunggu Trans Jateng. Penerapan Passenger Transport Information System (PTIS) di halte-halte utama diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi real-time terkait jadwal, rute, dan estimasi kedatangan bus. Selain itu, desain halte juga akan ditingkatkan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk penambahan fasilitas khusus yang mendukung mobilitas mereka. Dengan demikian, layanan Trans Jateng dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan.

Dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan Trans Jateng dapat semakin berperan sebagai tulang punggung transportasi publik modern di Jawa Tengah yang andal, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan melihat jumlah kebutuhan koridor serta fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu ada terobosan atau inovasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan transportasi umum aglomerasi yang lebih efektif dan efisien. Penerapan sitem BLUD Balai Transportasi Jawa Tengah harus memenuhi persyaratan substantif, Administratif dan teknis sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Dokumen administratif berupa Rencana Strategis BLUD Balai Transportasi Jawa Tengah disusun tersendiri sebagai bagian dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan Teknik analisis bisnis.

3. Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi

Berdasarkan Studi Pola Pengelolaan dan Pengembangan Angkutan Aglomerasi, dari 10 Wilayah Pengembangan (WP) di Jawa Tengah saat ini baru 5 WP yang dilayani oleh Trans Jateng, yaitu Kedungsepur, Subosukawonosraten, Cibalingmas, Gelangmanggung, dan Keburejo. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kebutuhan layanan angkutan massal berbasis bus aglomerasi sehingga perlu dilakukan penambahan koridor secara bertahap. Pengembangan koridor baru Trans Jateng diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan tema pembangunan tahunan Jawa Tengah. Strategi ini tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan layanan transportasi semata, melainkan juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor prioritas seperti pariwisata, industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pada tahun 2027, direncanakan pembukaan koridor baru Trans Jateng di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung. Langkah ini selaras dengan tema pembangunan tahun 2027, yaitu pariwisata, dengan fokus meningkatkan kunjungan wisata ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur serta memperluas akses ke destinasi pendukung di Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Kehadiran koridor baru diharapkan mampu memperkuat daya tarik Borobudur sebagai ikon pariwisata dunia sekaligus menumbuhkan destinasi wisata baru di sekitarnya.

Selanjutnya, pada tahun 2028, sesuai dengan tema pembangunan industri, akan dilakukan pengembangan dua koridor baru. Pertama, koridor Jekuti (Jepara–Kudus–Pati) yang diharapkan mendukung pengembangan kawasan industri unggulan, seperti industri mebel kayu berskala ekspor, industri rokok, serta industri makanan. Kedua, koridor baru di Wilayah Pengembangan Petanglong, yang selaras dengan implementasi Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Untuk mendukung pengembangan WP Petanglong, pada TA 2022 telah disusun Studi Kelayakan Layanan Angkutan Massal Aglomerasi Perkotaan dengan rekomendasi lima koridor, yaitu: Pekalongan – Kajen, Banyuputih – Batang, Limpung – Banyuputih, KIT Batang – Banyuputih, Weleri – Banyuputih (terintegrasi dengan WP Kedungsepur).

Pada tahap berikutnya, tahun 2029–2030, pengembangan diarahkan pada WP Cibalingmas dan Kedungsepur. Rute Cilacap–Purwokerto (2029) dan Demak–Semarang (2030) diproyeksikan akan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menjawab tantangan tingginya angka kemacetan serta kebutuhan mobilitas masyarakat dan logistik di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, penambahan koridor Trans Jateng dalam Renstra ini merupakan bagian dari strategi besar yaitu untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di

Jawa Tengah serta mendukung pengembangan sektor unggulan daerah (pariwisata, industri, dan pertumbuhan ekonomi).

4. Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global

   Upaya untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan bandara dan pelabuhan perintis di Provinsi Jawa Tengah terus dilakukan sebagai bagian dari strategi peningkatan konektivitas wilayah, pengembangan pariwisata, serta penguatan sektor industri dan perdagangan.

   Salah satu capaian penting adalah penerbangan perdana maskapai Susi Air pada 5 Juli 2025 yang menandai langkah awal optimalisasi Bandara Dewandaru di Karimunjawa. Pembukaan penerbangan reguler menuju Karimunjawa diharapkan mampu memperkuat posisi Karimunjawa sebagai destinasi pariwisata unggulan Jawa Tengah. Saat ini, penerbangan dilayani tiga kali dalam seminggu (Senin, Jumat, dan Minggu). Tingkat keterisian (load factor) masih fluktuatif, dengan rata-rata 84,3% untuk rute Semarang (SRG) – Karimunjawa (KWB) dan 61,1% untuk rute Karimunjawa (KWB) – Semarang (SRG), dengan dominasi penumpang wisatawan mancanegara. Capaian ini menunjukkan potensi besar, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan operasional dan meningkatkan jumlah penumpang.

   Selain Bandara Dewandaru, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga terus mendorong optimalisasi bandara perintis lainnya, yaitu Bandara Ngloram (Blora), Bandara Jenderal Besar Soedirman (Purbalingga), dan Bandara Tunggulwulung (Cilacap). Langkah yang ditempuh mencakup koordinasi pengembangan jaringan rute penerbangan, peningkatan kerja sama dengan maskapai, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta integrasi dengan sektor pariwisata dan perdagangan lokal.

   Di samping bandara, optimalisasi juga difokuskan pada pelabuhan perintis, khususnya Pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Batang. Kedua pelabuhan ini diarahkan untuk menopang sektor industri di kawasan sekitarnya. Saat ini, Kendal Seaport sedang dalam tahap canvassing guna menghimpun minat investasi serta kajian potensi bangkitan dan tarikan arus barang. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran pelabuhan sebagai simpul logistik dan distribusi barang, sekaligus mendorong tumbuhnya kawasan industri yang berdaya saing.

   Dengan penguatan peran bandara dan pelabuhan perintis secara terpadu, diharapkan terwujud konektivitas yang lebih baik, peningkatan aksesibilitas wilayah, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah Jawa Tengah.investor.

5. Peningkatan status Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional serta pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa Tengah

Saat ini Bandara Ahmad Yani (Semarang) dan Bandara Adi Soemarmo (Surakarta) telah resmi berstatus sebagai Bandar Udara Internasional, setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo serta 36 bandar udara lainnya sebagai bandar udara internasional. Keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya berkesinambungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong peningkatan status bandara strategis di wilayahnya.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terus melakukan langkah konkret untuk membuka dan memperluas jaringan penerbangan internasional. Salah satu capaian penting adalah dibukanya penerbangan perdana AirAsia rute Semarang – Kuala Lumpur yang mulai beroperasi pada 5 September 2025. Penerbangan ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas internasional Jawa Tengah, sekaligus memperkuat posisi Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo sebagai gerbang udara internasional.

Berdasarkan proyeksi PT Angkasa Pura Indonesia dengan mengacu pada data lalu lintas udara tahun 2019, Bandara Ahmad Yani memiliki potensi penerbangan internasional hingga 15.500 penumpang (pax). Potensi ini menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk terus mendorong optimalisasi peran bandara, baik melalui pengembangan kerja sama dengan maskapai penerbangan internasional maupun dengan mengintegrasikan layanan bandara dengan sektor-sektor strategis, seperti pariwisata, industri, dan perdagangan. Upaya yang dilakukan meliputi:

1. Membangun komunikasi intensif dengan maskapai nasional dan internasional untuk membuka rute baru;
2. Mendorong dan berupaya mengintegrasikan bandara dengan destinasi unggulan Jawa Tengah, seperti Candi Borobudur, Karimunjawa, Dieng, Solo Heritage, serta kawasan industri di Pantura dan sekitarnya;
3. Mendorong sinergi dengan sektor pariwisata dan perdagangan, agar peningkatan status bandara memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;

Dengan strategi tersebut, diharapkan Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi udara internasional, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian, pariwisata, dan perdagangan Jawa Tengah di tingkat nasional maupun global.

6. Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa

Selain bandara, tidak kalah penting adalah pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang memiliki peran strategis sebagai generator ekonomi Jawa Tengah. Pelabuhan ini merupakan salah satu pintu masuk utama arus barang, penumpang, ekspor-impor, serta jalur distribusi logistik di Jawa Tengah. Oleh karena itu,

optimalisasi perannya menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya optimalisasi Pelabuhan Tanjung Emas dilakukan melalui sinergi dengan para pemangku kepentingan, khususnya Pelindo dan Kementerian Perhubungan, untuk menangani berbagai permasalahan yang masih dihadapi. Beberapa langkah yang saat ini telah dan sedang dilakukan oleh pihak pelabuhan antara lain:

1. Penanganan permasalahan pendangkalan kolam dan alur pelayaran. Saat ini, Pelindo tengah melaksanakan survey bathimetri sebagai bagian dari upaya penanganan sedimentasi yang berpotensi mengganggu kelancaran arus kapal dan operasional pelabuhan.
2. Rencana perluasan Container Yard (CY). Dalam jangka waktu tiga tahun ke depan, direncanakan perluasan CY melalui relokasi tenant di Jalan Coaster, sehingga kapasitas pelayanan peti kemas dapat meningkat dan mendukung kelancaran arus logistik.
3. Pengembangan fasilitas pelabuhan. Perluasan seaway, modernisasi fasilitas bongkar muat, serta integrasi dengan sistem logistik nasional terus diupayakan untuk meningkatkan daya saing Pelabuhan Tanjung Emas.

Upaya-upaya tersebut merupakan langkah strategis dalam menjadikan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Diharapkan, dengan adanya peningkatan kapasitas, efisiensi, dan konektivitas, pelabuhan ini mampu memperkuat daya saing ekspor-impor Jawa Tengah, meningkatkan kelancaran distribusi barang, serta mendorong tumbuhnya sektor industri, perdagangan, dan logistik yang pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.

7. Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api

Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan transportasi nasional berbasis rel, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mendorong reaktivasi jalur-jalur kereta api sesuai arahan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas). Reaktivasi jalur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi beban lalu lintas jalan, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aksesibilitas transportasi.

Beberapa jalur strategis di Jawa Tengah yang masuk dalam prioritas reaktivasi meliputi:

1. Jalur Purwokerto – Wonosobo, sebagai penghubung kawasan Banyumas Raya dengan wilayah pegunungan tengah Jawa.
2. Jalur Kedungjati – Ambarawa – Tuntang, sebagai jalur bersejarah yang memiliki potensi besar untuk angkutan penumpang sekaligus pariwisata.
3. Jalur Cepu – Blora – Rembang – Lasem, yang berfungsi menghubungkan kawasan industri migas, kehutanan, dan hasil bumi dengan pelabuhan di pantai utara Jawa.

4. Jalur Cilacap – Kroya – Banjarnegara – Wonosobo, sebagai jalur alternatif untuk mendukung arus barang dan penumpang dari kawasan selatan Jawa.

Reaktivasi jalur-jalur tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyusunan studi kelayakan, pembebasan lahan, serta pengembangan kawasan pendukung stasiun dan simpul transportasi.

Dengan terealisasinya program reaktivasi jalur kereta api, diharapkan tercapai sistem transportasi berkelanjutan, terintegrasi, dan andal di Jawa Tengah, sekaligus memperkuat posisi provinsi ini sebagai simpul strategis transportasi nasional.

8. Penurunan tarif Trans Jateng

Sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan transportasi publik yang terjangkau, aman, dan inklusif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng. Melalui kebijakan ini, dilakukan penurunan tarif khusus Trans Jateng dari sebelumnya sebesar Rp2.000 menjadi Rp1.000 per perjalanan yang berlaku mulai tanggal 15 Mei 2025.

Kebijakan penurunan tarif ini diprioritaskan bagi kelompok masyarakat rentan seperti buruh, pelajar, mahasiswa, lansia, veteran, dan penyandang disabilitas. Langkah ini tidak hanya sekadar meringankan beban biaya transportasi harian, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas kerja, serta memperkuat perlindungan sosial.

Dengan terealisasinya kebijakan ini, transportasi publik Trans Jateng semakin berperan sebagai sarana mobilitas yang berkeadilan sosial. Tarif yang lebih terjangkau memungkinkan kelompok rentan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan kerja, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin. Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, yaitu terciptanya sistem transportasi yang inklusif serta penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merujuk pada indikator kinerja tujuan dan /atau sasaran yang telah tertuang dalam Bab IV serta indikator program pada Bab VI. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu Indeks pelayanan transportasi, Rasio konektivitas provinsi dan Persentase tingkat keselamatan transportasi jalan provinsi.

Secara lengkap Indikator Kinerja Utama, target dan capaian Tahun 2023 dan 2024, serta target capaian Tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel IV.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pelayanan Transportasi	6,345	6,614	6,660	6,788	6,904	7,019	7,126	7,242	
2	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	99,9824 %	99,9830 %	99,9836 %	99,9838 %	99,9842 %	99,9846 %	99,9850 %	99,9853 %	
3	Rasio Konektivitas Provinsi	0,206	0,264	0,274	0,302	0,327	0,352	0,375	0,401	
4	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	83,03	85,09	85,12	85,15	85,20	85,25	85,30	85,35	

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Tabel IV.4.Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	5,20 %	5,78 %	6,36 %	6,94 %	7,51 %	8,09 %	8,67 %	9,25 %	
2	Persentase kendaraan laik jalan di jawa tengah	97,76 %	97,98 %	98,01 %	98,03 %	98,05 %	98,08 %	98,10 %	98,12 %	

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2025

BAB V

PENUTUP

1. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mewadahi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029, perubahan lingkungan strategis, perubahan kebijakan nasional serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta bersifat logis, dinamis dan fleksibel agar berdaya guna dan berhasil guna. Target indikator, fokus dan lokus dalam renstra menyesuaikan dengan dinamika perubahan global, nasional dan regional serta ketersediaan anggaran mendasarkan pada kemampuan keuangan daerah;
2. Adapun kaidah-kaidah penyusunan renstra adalah :
   a. Bappeda telah melakukan proses teknokratis untuk menghasilkan rancangan teknokratis RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disusun rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2045.
   b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyusun Rancangan Awal Renstra PD dengan mempertimbangkan masukan dari *Stakeholders* terkait dan menyelenggarakan Forum PD untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan Renstra PD;
   c. Bappeda melakukan proses finalisasi RPJMD 2025-2029 melalui Forum Musrenbang.
   d. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyempurnakan Renstra PD berdasarkan Perubahan RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
3. Tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah dijadikan :
   a. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
   b. Panduan penyelarasan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
   c. Penyusunan Rencana Strategis Balai transportasi Jawa Tengah dengan penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
   d. Monitoring dan evaluasi pasca penyusunan Renstra.

Lampiran I : Pohon Kinerja Rencana Strategis
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

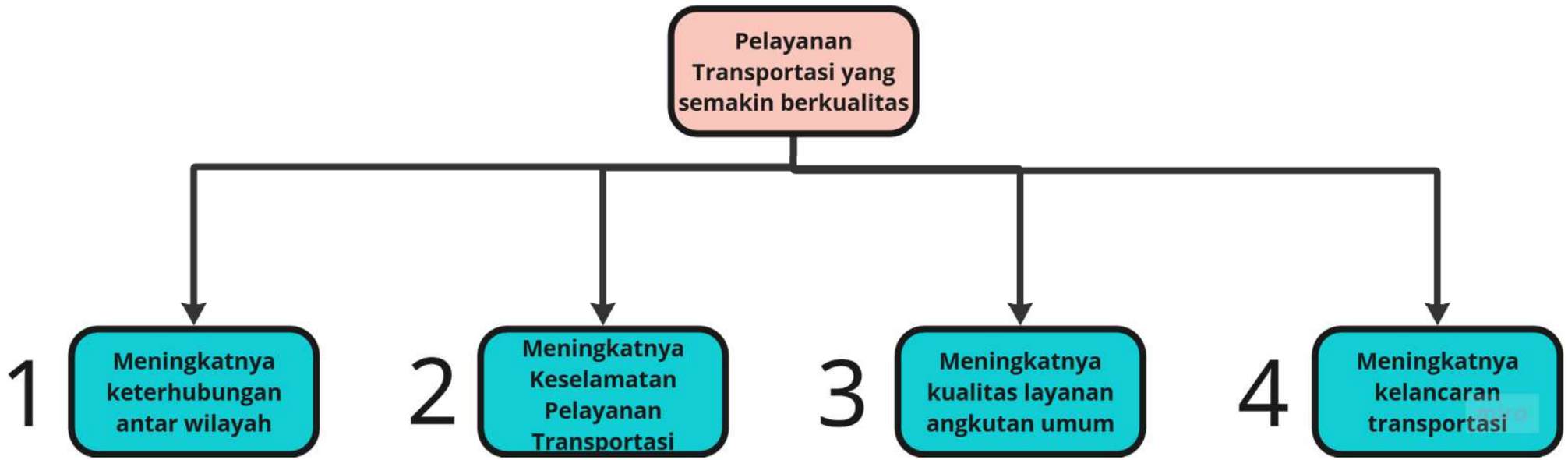

1

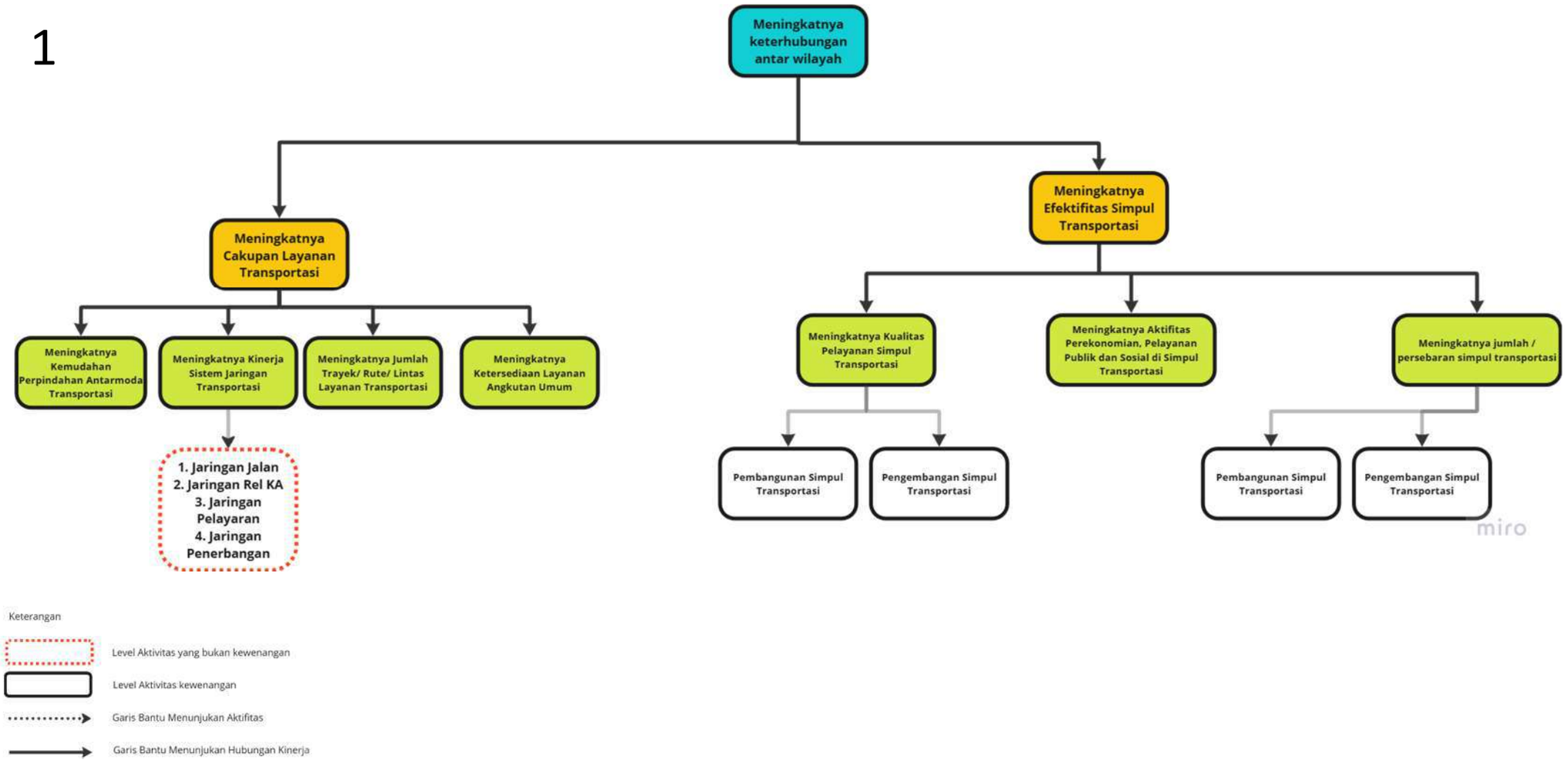

Keterangan

Level Aktivitas yang bukan kewenangan

Level Aktivitas kewenangan

Garis Bantu Menunjukan Aktifitas

Garis Bantu Menunjukan Hubungan Kinerja

2

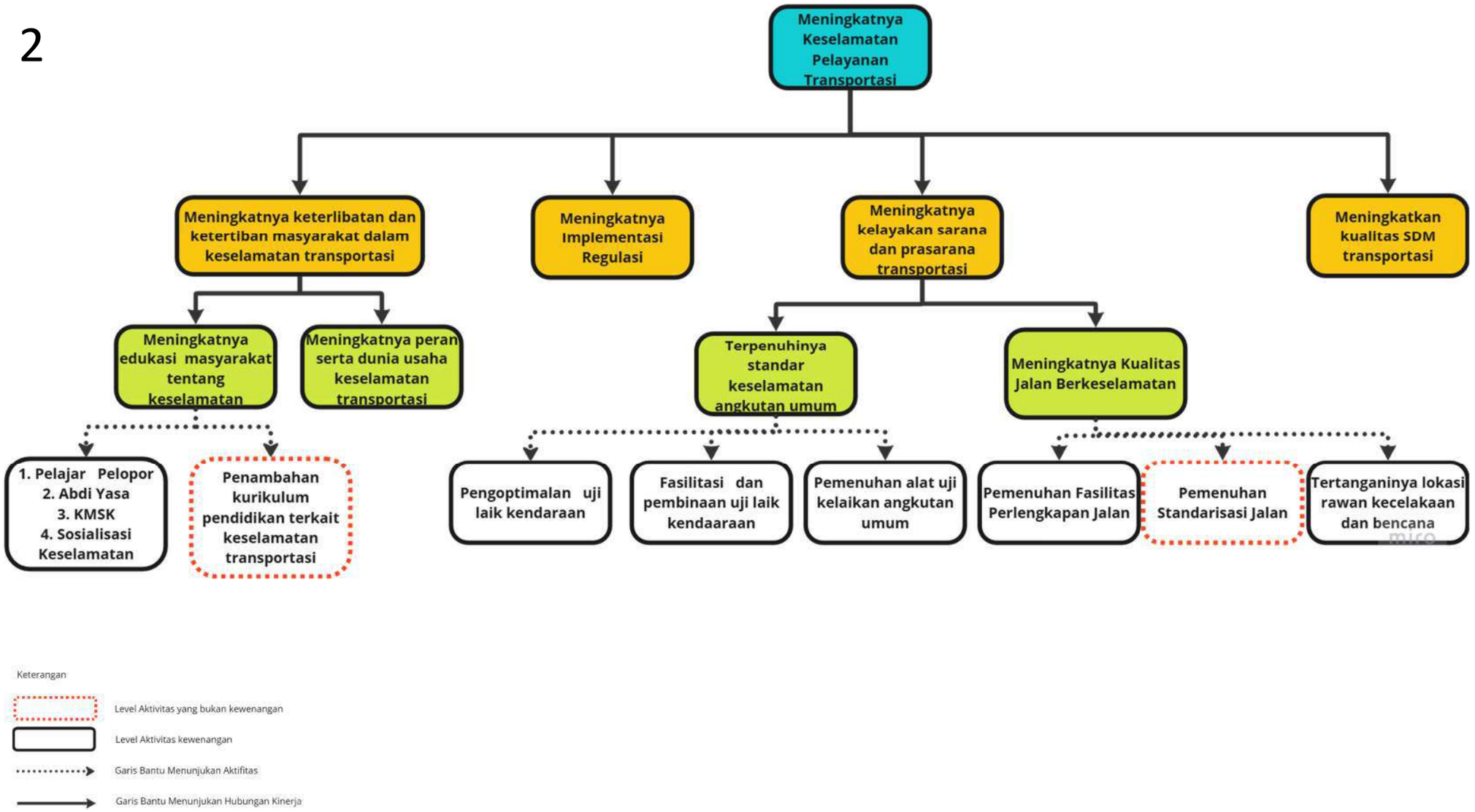
Meningkatnya Keselamatan Pelayanan Transportasi
Meningkatnya keterlibatan dan ketertiban masyarakat dalam keselamatan transportasi
Meningkatnya Implementasi Regulasi
Meningkatnya kelayakan sarana dan prasarana transportasi
Meningkatkan kualitas SDM transportasi
Meningkatnya edukasi masyarakat tentang keselamatan
Meningkatnya peran serta dunia usaha keselamatan transportasi
Terpenuhinya standar keselamatan angkutan umum
Meningkatnya Kualitas Jalan Berkeselamatan
1. Pelajar Pelopor
2. Abdi Yasa
3. KMSK
4. Sosialisasi Keselamatan
Penambahan kurikulum pendidikan terkait keselamatan transportasi
Pengoptimalan uji laik kendaraan
Fasilitasi dan pembinaan uji laik kendaaraan
Pemenuhan alat uji kelaikan angkutan umum
Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Pemenuhan Standarisasi Jalan
Tertanganinya lokasi rawan kecelakaan dan bencana
Keterangan
Level Aktivitas yang bukan kewenangan
Level Aktivitas kewenangan
Garis Bantu Menunjukan Aktifitas
Garis Bantu Menunjukan Hubungan Kinerja

3

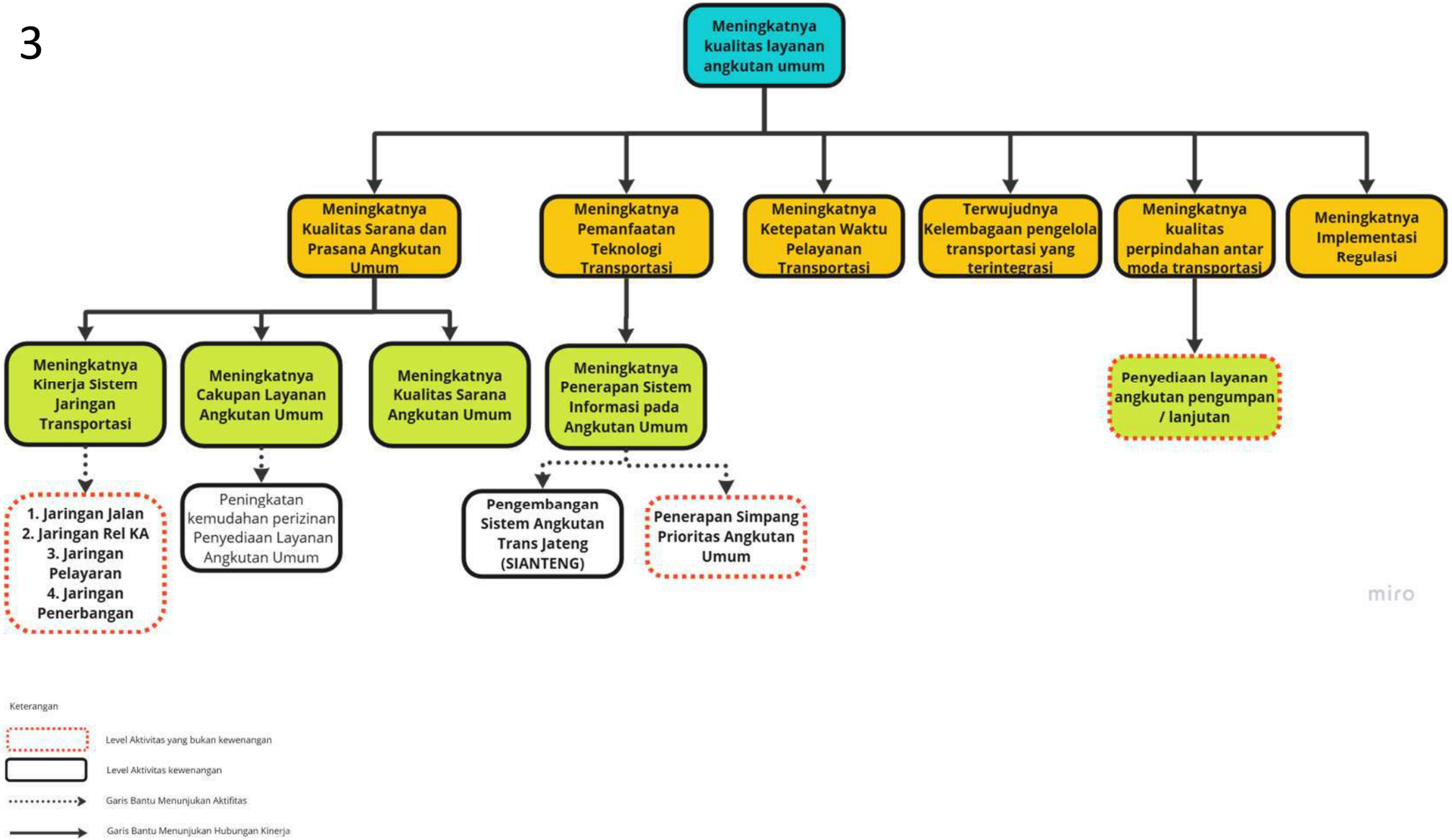

Keterangan

Level Aktivitas yang bukan kewenangan

Level Aktivitas kewenangan

Garis Bantu Menunjukan Aktifitas

Garis Bantu Menunjukan Hubungan Kinerja

4

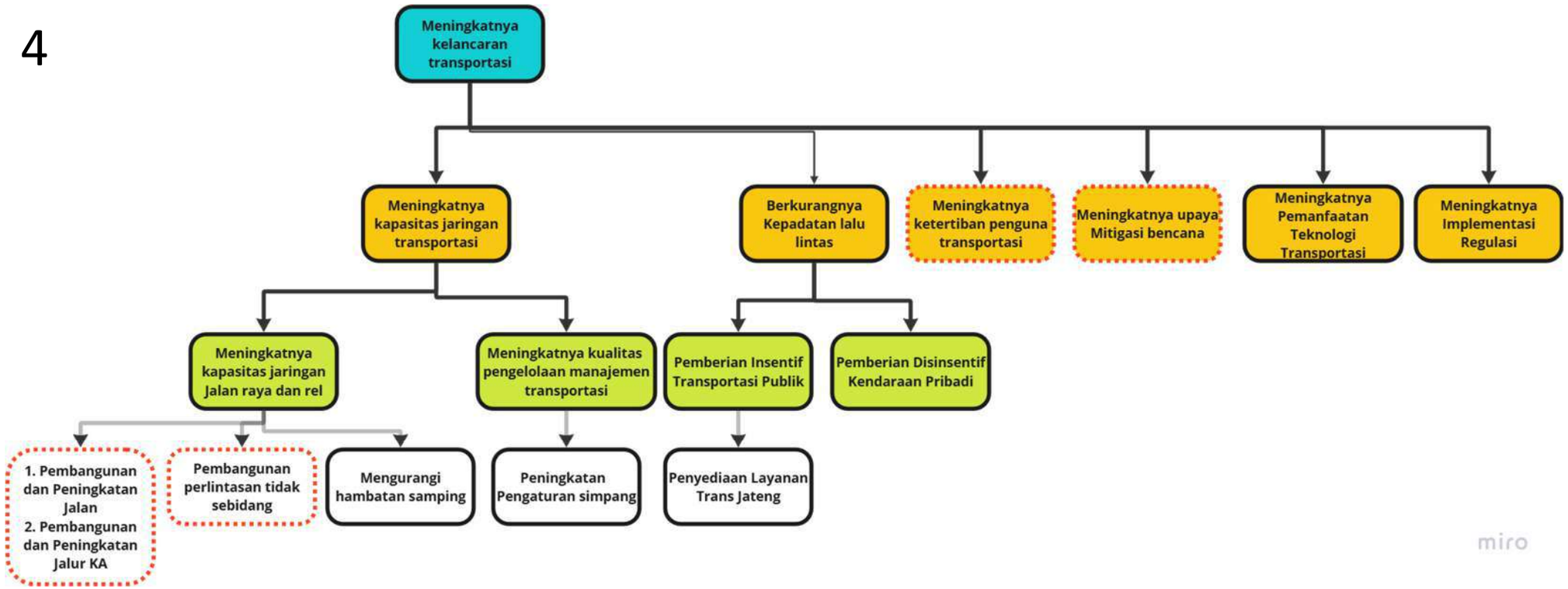
Meningkatnya kelancaran transportasi
Meningkatnya kapasitas jaringan transportasi
Berkurangnya Kepadatan lalu lintas
Meningkatnya ketertiban penguna transportasi
Meningkatnya upaya Mitigasi bencana
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Transportasi
Meningkatnya Implementasi Regulasi
Meningkatnya kapasitas jaringan Jalan raya dan rel
Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen transportasi
Pemberian Insentif Transportasi Publik
Pemberian Disinsentif Kendaraan Pribadi
1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan
2. Pembangunan dan Peningkatan Jalur KA
Pembangunan perlintasan tidak sebidang
Mengurangi hambatan samping
Peningkatan Pengaturan simpang
Penyediaan Layanan Trans Jateng
miro

Keterangan
Level Aktivitas yang bukan kewenangan
Level Aktivitas kewenangan
Garis Bantu Menunjukan Aktifitas
Garis Bantu Menunjukan Hubungan Kinerja

Lampiran II : Cascading Rencana Strategis
Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2025-2029

CASCADING RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) DINAS PERHBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2029

CASCADING DINAS PERHUBUNGAN

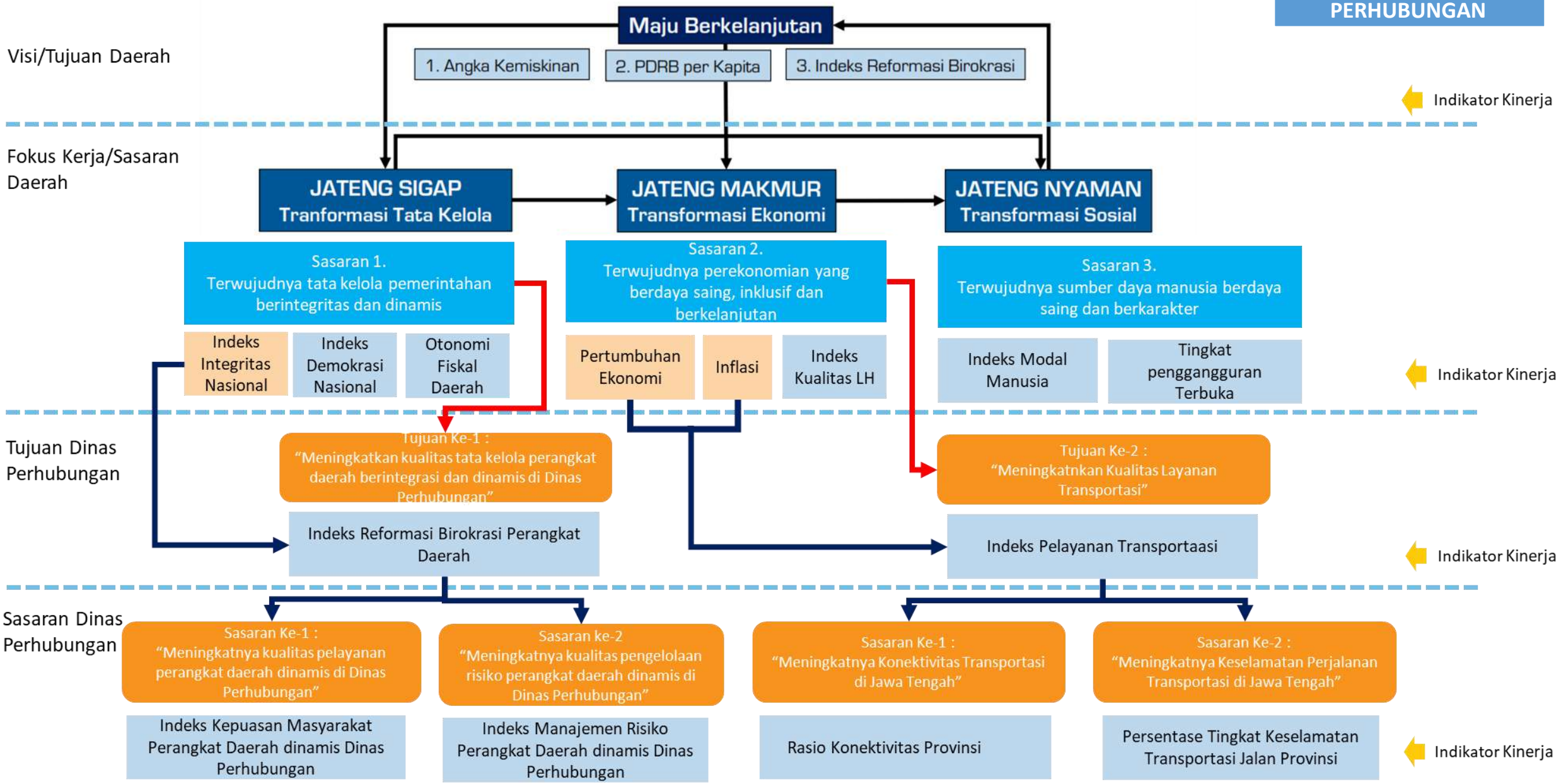

CASCADING TUJUAN 1 DINAS PERHUBNGAN

TUJUAN DAERAH

TUJUAN DAERAH

Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan
IK : PDRB Perkapita
IK Angka Kemiskinan
IK Rasio Gini

SASARAN DAERAH

SASARAN 2 DAERAH

Terwujudnya perekonomian yang berdayasaing, inklusif dan berkelanjutan

IK
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Inflasi

TUJUAN DINAS

TUJUAN PD

Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi

IK : Indeks Pelayanan Transportasi
DO : Indek Pelayanan Transportasi menggambarkan tingkat pelayanan transportasi yang diukur dari unsur Konektivitas Provinsi, dan Tingkat Keselamatan
Satuan : Angka (0-10) .

SASARAN DINAS

MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DI JAWA TENGAH

IK : Rasio Konektivitas Provinsi
DO : Mengukur Rata - rata rasio Konektivitas Transportasi Darat, Rasio Konektivitas Perkotaan (persentase penduduk terlayani transportasi umum Trans Jateng) dan Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP
Satuan : Angka (0-1)

SASARAN 1

MENINGKATNYA KESELAMATAN PERJALANAN TRANSPORTASI DI JAWA TENGAH

IK : Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi
DO : Mengukur tingkat keselamatan AKDP dengan acceptable level maksimum 1 Accident/1 juta keberangkatan
Satuan : %

SASARAN 2

PROGRAM

1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G

2A 2B 2C 2D 2E

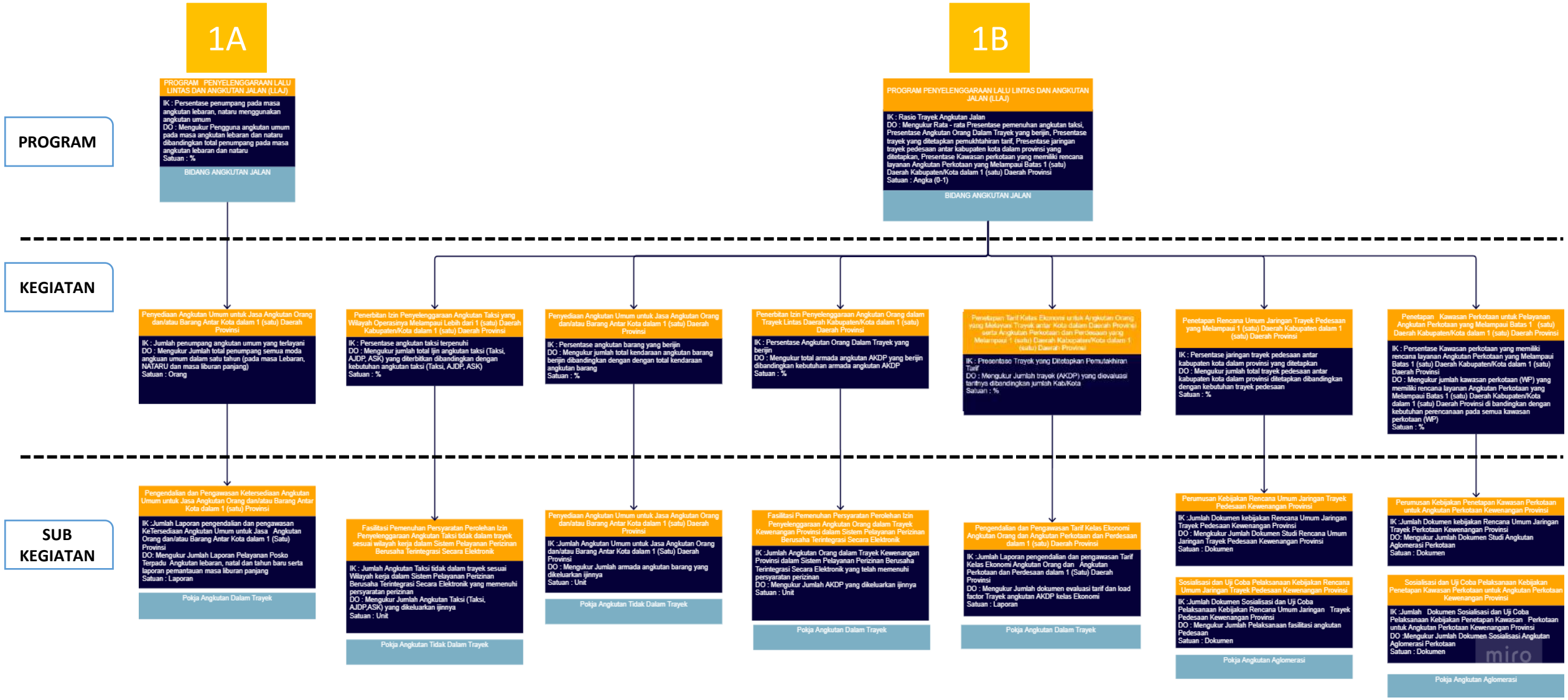
1A
1B
PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
IK : Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum
DO : Mengukur Pengguna angkutan umum pada masa angkutan lebaran dan nataru dibandingkan total penumpang pada masa angkutan lebaran dan nataru
Satuan : %
BIDANG ANGKUTAN JALAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
IK : Rasio Trayek Angkutan Jalan
DO : Mengukur Rata - rata Presentase pemenuhan angkutan taksi, Presentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin, Presentase trayek yang ditetapkan pemukhtahiran tarif, Presentase jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan, Presentase Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Satuan : Angka (0-1)
BIDANG ANGKUTAN JALAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
IK : Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani
DO : Mengukur Jumlah total penumpang semua moda angkuan umum dalam satu tahun (pada masa Lebaran, NATARU dan masa liburan panjang)
Satuan : Orang
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
IK : Persentase angkutan taksi terpenuhi
DO : Mengukur jumlah total ijin angkutan taksi (Taksi, AJDP, ASK) yang diterbitkan dibandingkan dengan kebutuhan angkutan taksi (Taksi, AJDP, ASK)
Satuan : %
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
IK : Persentase angkutan barang yang berijin
DO : Mengukur jumlah total kendaraan angkutan barang berijin dibandingkan dengan dengan total kendaraan angkutan barang
Satuan : %
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
IK : Persentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin
DO : Mengukur total armada angkutan AKDP yang berijin dibandingkan kebutuhan armada angkutan AKDP
Satuan : %
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
IK : Presentase Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif
DO : Mengukur Jumlah trayek (AKDP) yang dievaluasi tarifnya dibandingkan jumlah Kab/Kota
Satuan : %
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
IK : Persentase jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan
DO : Mengukur jumlah total trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi ditetapkan dibandingkan dengan kebutuhan trayek pedesaan
Satuan : %
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
IK : Persentase Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi di bandingkan dengan kebutuhan perencanaan pada semua kawasan perkotaan (WP)
Satuan : %
DO : Mengukur jumlah kawasan perkotaan (WP) yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
IK :Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
DO: Mengukur Jumlah Laporan Pelayanan Posko Terpadu Angkutan lebaran, natal dan tahun baru serta laporan pemantauan masa liburan panjang
Satuan : Laporan
Pokja Angkutan Dalam Trayek
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
IK : Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan
DO : Mengukur Jumlah Angkutan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang dikeluarkan ijinnya
Satuan : Unit
Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
IK :Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
DO : Mengukur Jumlah armada angkutan barang yang dikeluarkan ijinnya
Satuan : Unit
Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
IK :Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan
DO : Mengukur Jumlah AKDP yang dikeluarkan ijinnya
Satuan : Unit
Pokja Angkutan Dalam Trayek
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
IK :Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
DO : Mengukur Jumlah dokumen evaluasi tarif dan load factor Trayek angkutan AKDP kelas Ekonomi
Satuan : Laporan
Pokja Angkutan Dalam Trayek
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
IK :Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
DO : Mengkukur Jumlah Dokumen Studi Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
Satuan : Dokumen
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
IK :Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
DO : Mengukur Jumlah Pelaksanaan fasilitasi angkutan Pedesaan
Satuan : Dokumen
Pokja Angkutan Aglomerasi
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
IK :Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
DO: Mengukur Jumlah Dokumen Studi Angkutan Aglomerasi Perkotaan
Satuan : Dokumen
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
IK :Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
DO :Mengukur Jumlah Dokumen Sosialisasi Angkutan Aglomerasi Perkotaan
Satuan : Dokumen
Pokja Angkutan Aglomerasi
miro

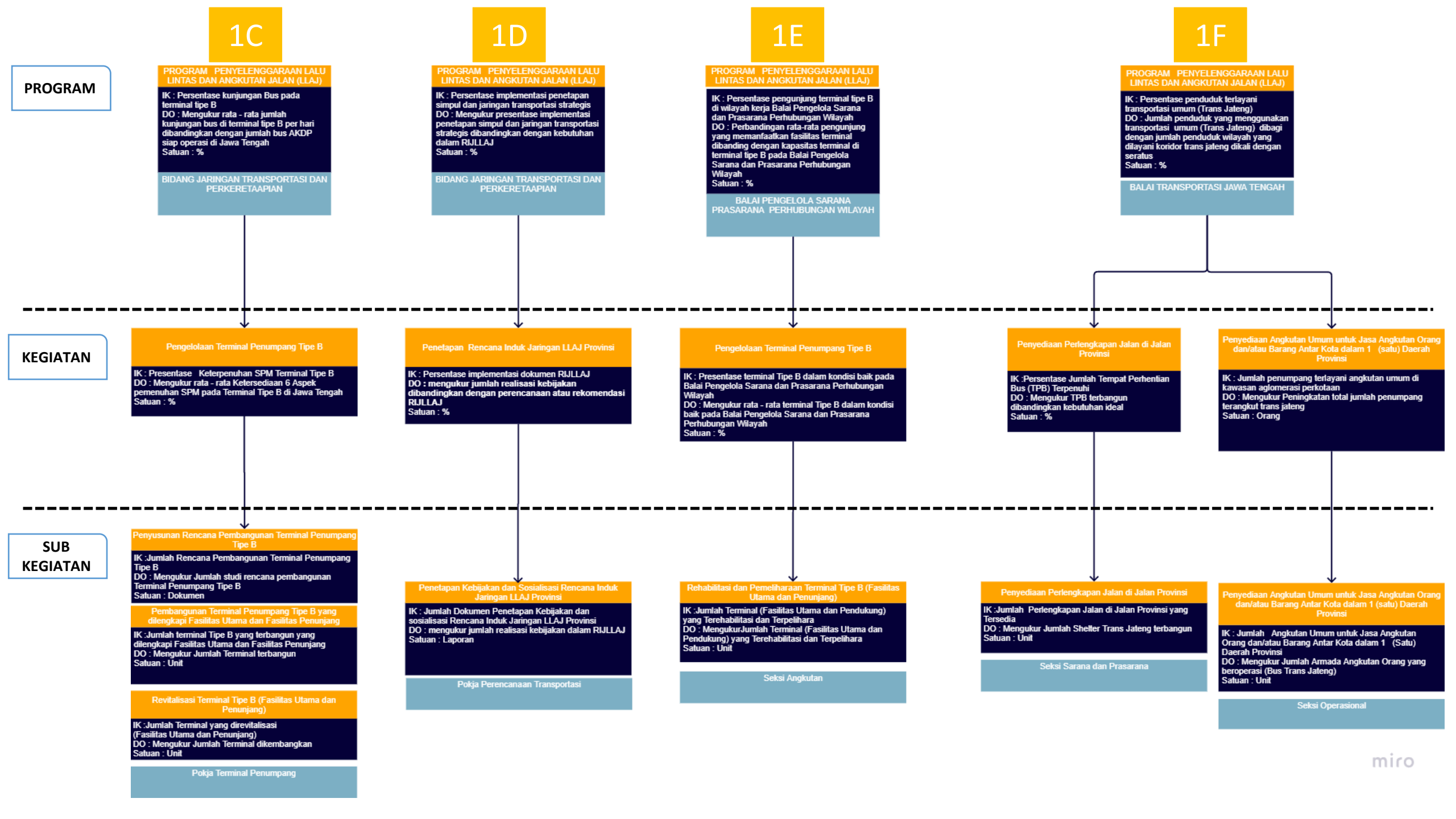
1C
1D
1E
1F
PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
IK : Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B
DO : Mengukur rata - rata jumlah kunjungan bus di terminal tipe B per hari dibandingkan dengan jumlah bus AKDP siap operasi di Jawa Tengah
Satuan : %
BIDANG JARINGAN TRANSPORTASI DAN PERKERETAAPIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
IK : Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis
DO : Mengukur presentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis dibandingkan dengan kebutuhan dalam RIJLLAJ
Satuan : %
BIDANG JARINGAN TRANSPORTASI DAN PERKERETAAPIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
IK : Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Perbandingan rata-rata pengunjung yang memanfaatkan fasilitas terminal dibanding dengan kapasitas terminal di terminal tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : %
BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
IK : Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)
DO : Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum (Trans Jateng) dibagi dengan jumlah penduduk wilayah yang dilayani koridor trans jateng dikali dengan seratus
Satuan : %
BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
IK : Presentase Keterpenuhan SPM Terminal Tipe B
DO : Mengukur rata - rata Ketersediaan 6 Aspek pemenuhan SPM pada Terminal Tipe B di Jawa Tengah
Satuan : %
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
IK : Persentase implementasi dokumen RIJLLAJ
DO : mengukur jumlah realisasi kebijakan dibandingkan dengan perencanaan atau rekomendasi RIJLLAJ
Satuan : %
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
IK : Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur rata - rata terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : %
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
IK :Persentase Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi
DO : Mengukur TPB terbangun dibandingkan kebutuhan ideal
Satuan : %
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
IK : Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan
DO : Mengukur Peningkatan total jumlah penumpang terangkut trans jateng
Satuan : Orang
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
IK :Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
DO : Mengukur Jumlah studi rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
Satuan : Dokumen
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
IK :Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
DO : Mengukur Jumlah Terminal terbangun
Satuan : Unit
Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
IK :Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)
DO : Mengukur Jumlah Terminal dikembangkan
Satuan : Unit
Pokja Terminal Penumpang
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
IK : Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
DO : mengukur jumlah realisasi kebijakan dalam RIJLLAJ
Satuan : Laporan
Pokja Perencanaan Transportasi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
IK :Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara
DO : MengukurJumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara
Satuan : Unit
Seksi Angkutan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
IK :Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia
DO : Mengukur Jumlah Shelter Trans Jateng terbangun
Satuan : Unit
Seksi Sarana dan Prasarana
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
IK : Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
DO : Mengukur Jumlah Armada Angkutan Orang yang beroperasi (Bus Trans Jateng)
Satuan : Unit
Seksi Operasional
miro

1G

PROGRAM

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

IK : Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP
DO : Mengukur rata -rata Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasrkan tingkatannya, Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi, Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin
Satuan : Angka (0-1)

BIDANG PELAYARAN

KEGIATAN

Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan

IK : Persentase dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya
DO : Mengukur Jumlah Surat keterangan pengukuran dan PAS sungai terlengkapi dibandingkan total kebutuhan dokumen
Satuan : %

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK : Persentase Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi
DO : Mengukur Jumlah fasilitas pelabuhan SDP terpasang dibandingkan kebutuhan
Satuan : %

Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

IK : Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi
DO : Mengukur Jumlah Pengawasan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang berijin
Satuan : %

Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

IK : Berth occupancy ratio
DO : Mengukur BOR untuk pelabuhan Pengumpan Regional
Satuan : %

SUB KEGIATAN

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

IK :Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan
DO : Mengukur Jumlah angkutan kapal yang dilengkapi Surat keterangan pengukuran dan PAS sungai
Satuan : Unit

Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK :Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan
DO : Mengukur Jumlah Dermaga Sungai terfasilitasi dokumen perizinannya
Satuan : Laporan

Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK :Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun
DO : Mengukur Jumlah Dermaga sungai terbangun
Satuan : Unit

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK :Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaanara
DO : Mengukur Jumlah Dermaga sungai terpelihara
Satuan : Unit

Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

IK :Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia Provinsi
DO : Mengukur Pemenuhan fasilitas keselamatan (berupa life jacket 12 per kapal, Lampu Penerangan Dermaga, rambu keselamatan, papan SOP penyeberangan)
Satuan : Unit

Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

IK :Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
DO : Mengukur Jumlah Dokumen Pengawasan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut, Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dan Usaha Jasa Terkait berupa Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
Satuan : Dokumen

Pokja Angkutan Laut

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

IK :Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian perizinan
DO : Mengukur Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional terfasilitasi perizinannya
Satuan : Unit

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional

IK :Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara
DO : Mengukur Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara
Satuan : Unit

Pokja Kepelabuhanan

miro

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

2A

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

IK : Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan provinsi
DO : Mengukur jumlah ruas jalan provinsi yang telah memenuhi kebutuhan semua jenis perlengkapan jalan di atas 60% dibandingkan dengan jumlah ruas jalan provinsi
Satuan : %

BIDANG LALU LINTAS JALAN

2B

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

IK : Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur Mengukur persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di tahun berjalan dibandingkan dengan angka kejadian kecelakaan di tahun sebelumnya pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : %

BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

IK : Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng
DO : Jumlah Kabupaten/Kota yang diusulkan Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional
Satuan : Kabupaten/Kota

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi

IK : Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin
DO : mengukur jumlah kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin dibandingkan dengan jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan
Satuan : %

Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi

IK : Persentase perlengkapan jalan terpenuhi
DO : Mengukur Rata - rata persentase jumlah per jenis perlengkapan jalan dibandingkan dengan total kebutuhan per jenis perlengkapan jalan
Satuan : %

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

IK : Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ
DO : Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ yang ditindak lanjuti
Satuan : Dokumen

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

IK : Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
DO : Mengukur Jumlah Penanganan DRK dibandingkan Jumlah Total DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
Satuan : %

Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

IK: Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
DO: Mengukur Jumlah Dokumen Sosialisasi Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng terkait Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional
Satuan : Dokumen

Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan

Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin

IK : Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan
DO : Mengukur jumlah pembahasan dokumen andalalin di Ruas Jalan Provinsi
Satuan : Angka

Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

IK : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia
DO : Mengukur Perlengkapan Jalan yang terpasang di Jalan Provinsi
Satuan : Unit

Pokja Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi

IK :Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
DO :Mengukur Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
Satuan : Laporan

Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

IK :Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan
DO : Mengukur Jumlah Penanganan DRK
Satuan : Unit

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

IK: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
DO: Mangukur Jumlah :
Mengukur Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan
Satuan : Laporan

Seksi Lalu Lintas

miro

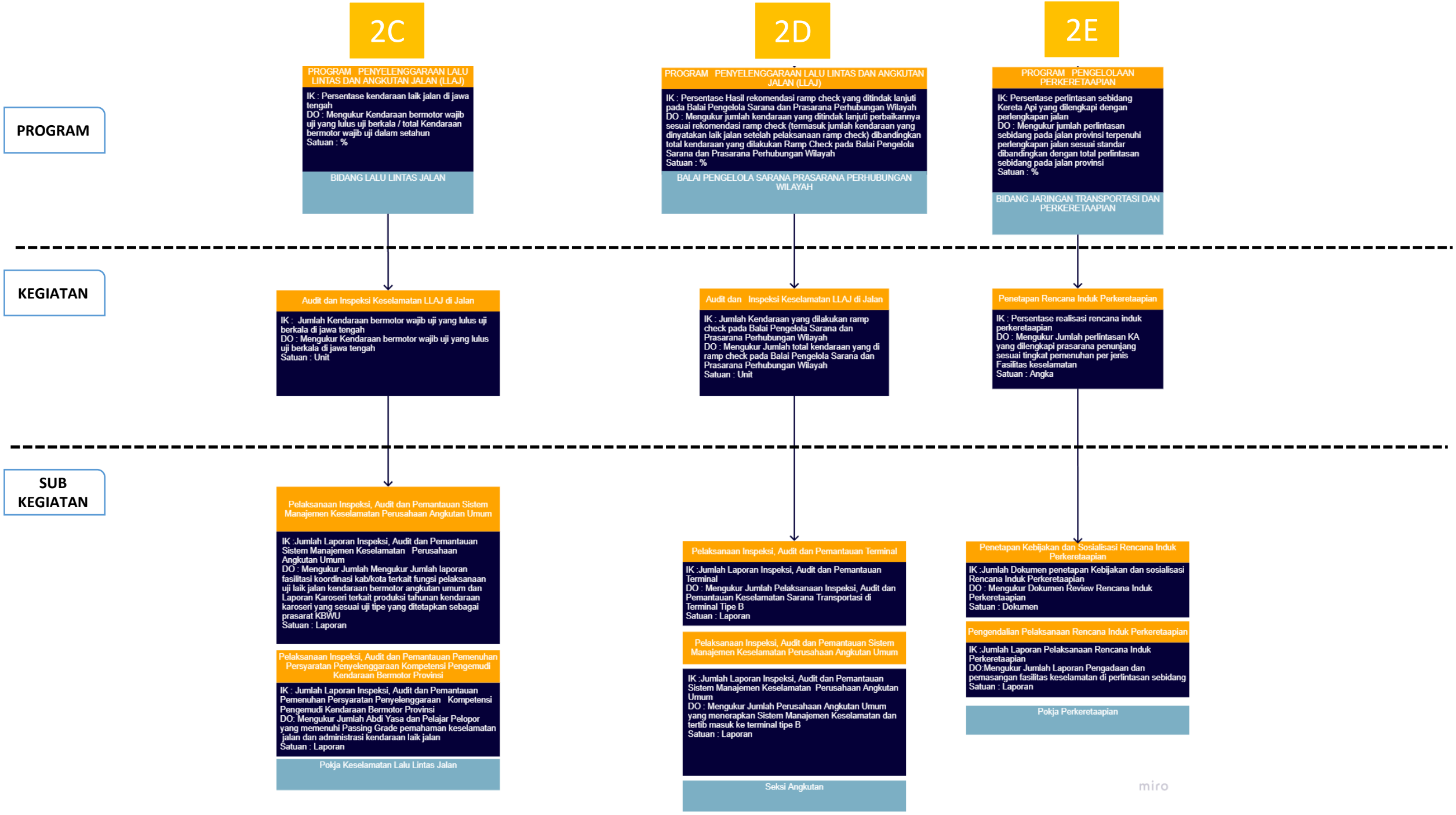
2C
2D
2E
PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
IK : Persentase kendaraan laik jalan di jawa tengah
DO : Mengukur Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala / total Kendaraan bermotor wajib uji dalam setahun
Satuan : %
BIDANG LALU LINTAS JALAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
IK : Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur jumlah kendaraan yang ditindak lanjuti perbaikannya sesuai rekomendasi ramp check (termasuk jumlah kendaraan yang dinyatakan laik jalan setelah pelaksanaan ramp check) dibandingkan total kendaraan yang dilakukan Ramp Check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : %
BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
IK: Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan
DO : Mengukur jumlah perlintasan sebidang pada jalan provinsi terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar dibandingkan dengan total perlintasan sebidang pada jalan provinsi
Satuan : %
BIDANG JARINGAN TRANSPORTASI DAN PERKERETAAPIAN
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
IK : Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah
DO : Mengukur Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah
Satuan : Unit
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
IK : Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur Jumlah total kendaraan yang di ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : Unit
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
IK : Persentase realisasi rencana induk perkeretaapian
DO : Mengukur Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan
Satuan : Angka
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
IK :Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
DO : Mengukur Jumlah Mengukur Jumlah laporan fasilitasi koordinasi kab/kota terkait fungsi pelaksanaan uji laik jalan kendaraan bermotor angkutan umum dan Laporan Karoseri terkait produksi tahunan kendaraan karoseri yang sesuai uji tipe yang ditetapkan sebagai prasarat KBWU
Satuan : Laporan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
IK : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
DO: Mengukur Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan dan administrasi kendaraan laik jalan
Satuan : Laporan
Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
IK :Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
DO : Mengukur Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B
Satuan : Laporan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
IK :Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
DO : Mengukur Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan tertib masuk ke terminal tipe B
Satuan : Laporan
Seksi Angkutan
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
IK :Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
DO : Mengukur Dokumen Review Rencana Induk Perkeretaapian
Satuan : Dokumen
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
IK :Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
DO:Mengukur Jumlah Laporan Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang
Satuan : Laporan
Pokja Perkeretaapian
miro

CASCADING TUJUAN 2 DINAS PERHUBNGAN

TUJUAN DAERAH

TUJUAN DAERAH

Masyarakat Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan
IK : PDRB per Kapita
IK : Angka Kemiskinan
IK : Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN DAERAH

SASARAN 1 DAERAH

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis

IK : Indeks Integritas Nasional

TUJUAN DINAS

TUJUAN PD

Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan

IK : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
DO : Indeks RB mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan, yang diukur dari unsur komponen pengungkit (meliputi 8 area perubahan) dan komponen hasil
Satuan : Angka (0-10) .

SASARAN DINAS

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DI DINAS PERHUBUNGAN

IK : Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
DO : IKM untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, yang didapatkan dari survei kepuasan masyarakat
Satuan : Angka

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN RISIKO PERANGKAT DAERAH DI DINAS PERHUBUNGAN

IK : Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
DO : Ukuran yang menggambarkan implementasi manajemen risiko di lingkup perangkat daerah
Satuan : Angka

SASARAN 2

PROGRAM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

IK : Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
DO : Mengukur rata-rata dari tingkat ketercapaian kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah
Satuan : %

BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH

PROGRAM 1.1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

IK : Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan
DO : Mengukur rata-rata dari tingkat ketercapaian kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
Satuan : %

SEKRETARIAT

PROGRAM 1.2

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

IK : Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur rata-rata dari tingkat ketercapaian kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : %

BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH

PROGRAM 1.3

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

IK : Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan
DO : Mengukur tingkat ketercapaian kinerja utama (Indikator Kinerja Utama/IKU) perangkat daerah
Satuan : %

SEKRETARIAT

PROGRAM 2.1

KEGIATAN

- 1.1A
- 1.1B
- 1.1C
- 1.1D
- 1.1E
- 1.1F
- 1.2A
- 1.2B
- 1.2C
- 1.2D
- 1.2E
- 1.2F
- 1.2G
- 1.3A
- 1.3B
- 1.3C
- 1.3D
- 1.3E
- 2.1A

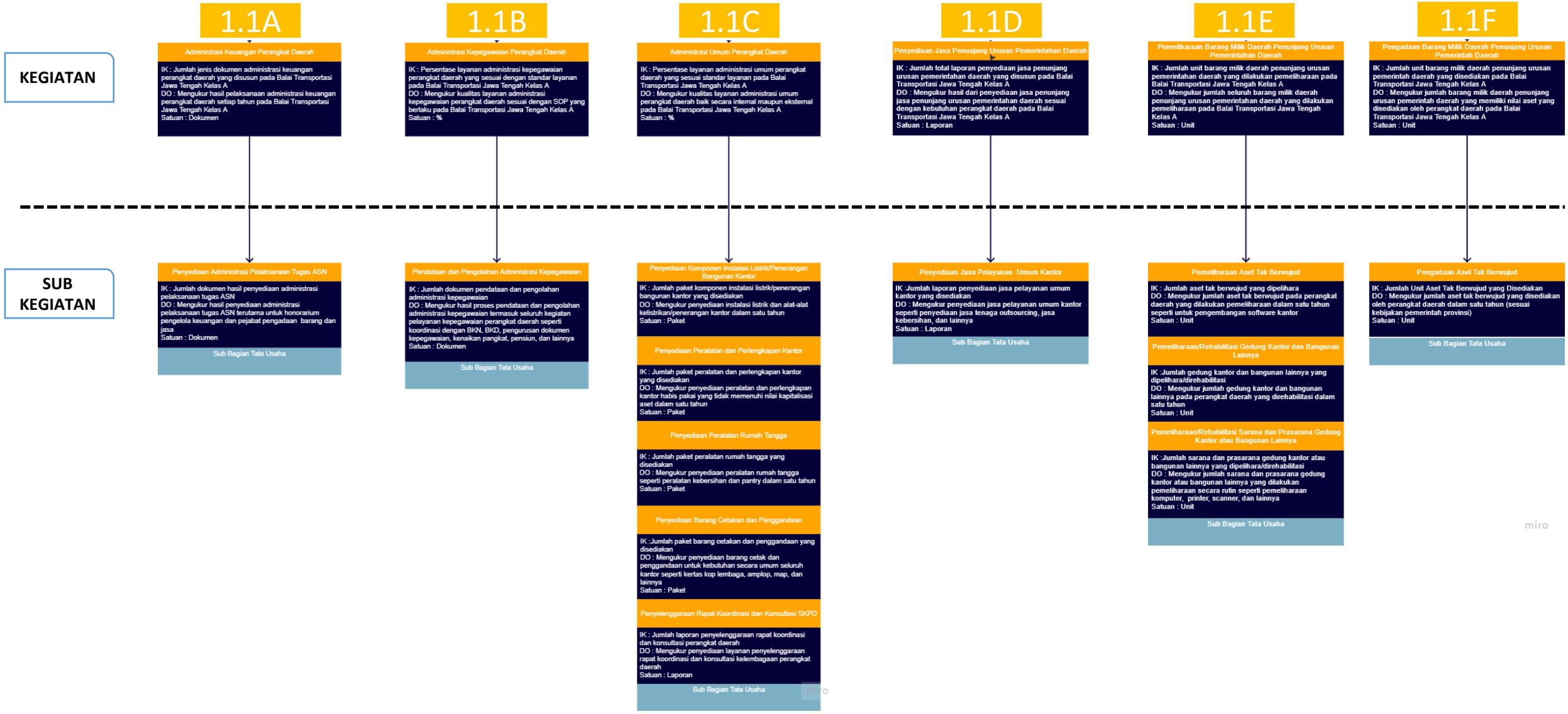
1.1A
1.1B
1.1C
1.1D
1.1E
1.1F
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
IK : Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
DO : Mengukur hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah setiap tahun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
Satuan : Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
IK : Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
DO : Mengukur kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan SOP yang berlaku pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
Satuan : %
Administrasi Umum Perangkat Daerah
IK : Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
DO : Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
Satuan : %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
IK : Jumlah total laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
DO : Mengukur hasil dari penyediaan jasa penunjang jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
Satuan : Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
DO : Mengukur jumlah seluruh barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
Satuan : Unit
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
DO : Mengukur jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset yang disediakan oleh perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
Satuan : Unit
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
IK : Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
DO : Mengukur hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN terutama untuk honorarium pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa
Satuan : Dokumen
Sub Bagian Tata Usaha
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
IK : Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
DO : Mengukur hasil proses pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian termasuk seluruh kegiatan pelayanan kepegawaian perangkat daerah seperti koordinasi dengan BKN, BKD, pengurusan dokumen kepegawaian, kenaikan pangkat, pensiun, dan lainnya
Satuan : Dokumen
Sub Bagian Tata Usaha
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
IK : Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan instalasi listrik dan alat-alat kelistrikan/penerangan kantor dalam satu tahun
Satuan : Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
IK : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset dalam satu tahun
Satuan : Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
IK : Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan peralatan rumah tangga seperti peralatan kebersihan dan pantry dalam satu tahun
Satuan : Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
IK :Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk kebutuhan secara umum seluruh kantor seperti kertas kop lembaga, amplop, map, dan lainnya
Satuan : Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
IK : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
DO : Mengukur penyediaan layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelembagaan perangkat daerah
Satuan : Laporan
Sub Bagian Tata Usaha
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
IK :Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan jasa pelayanan umum kantor seperti penyediaan jasa tenaga outsourcing, jasa kebersihan, dan lainnya
Satuan : Laporan
Sub Bagian Tata Usaha
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
IK : Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara
DO : Mengukur jumlah aset tak berwujud pada perangkat daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun seperti untuk pengembangan software kantor
Satuan : Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IK :Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
DO : Mengukur jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya pada perangkat daerah yang direhabilitasi dalam satu tahun
Satuan : Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IK :Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
DO : Mengukur jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan secara rutin seperti pemeliharaan komputer, printer, scanner, dan lainnya
Satuan : Unit
Sub Bagian Tata Usaha
Pengadaan Aset Tak Berwujud
IK : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
DO : Mengukur jumlah aset tak berwujud yang disediakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun (sesuai kebijakan pemerintah provinsi)
Satuan : Unit
Sub Bagian Tata Usaha
miro

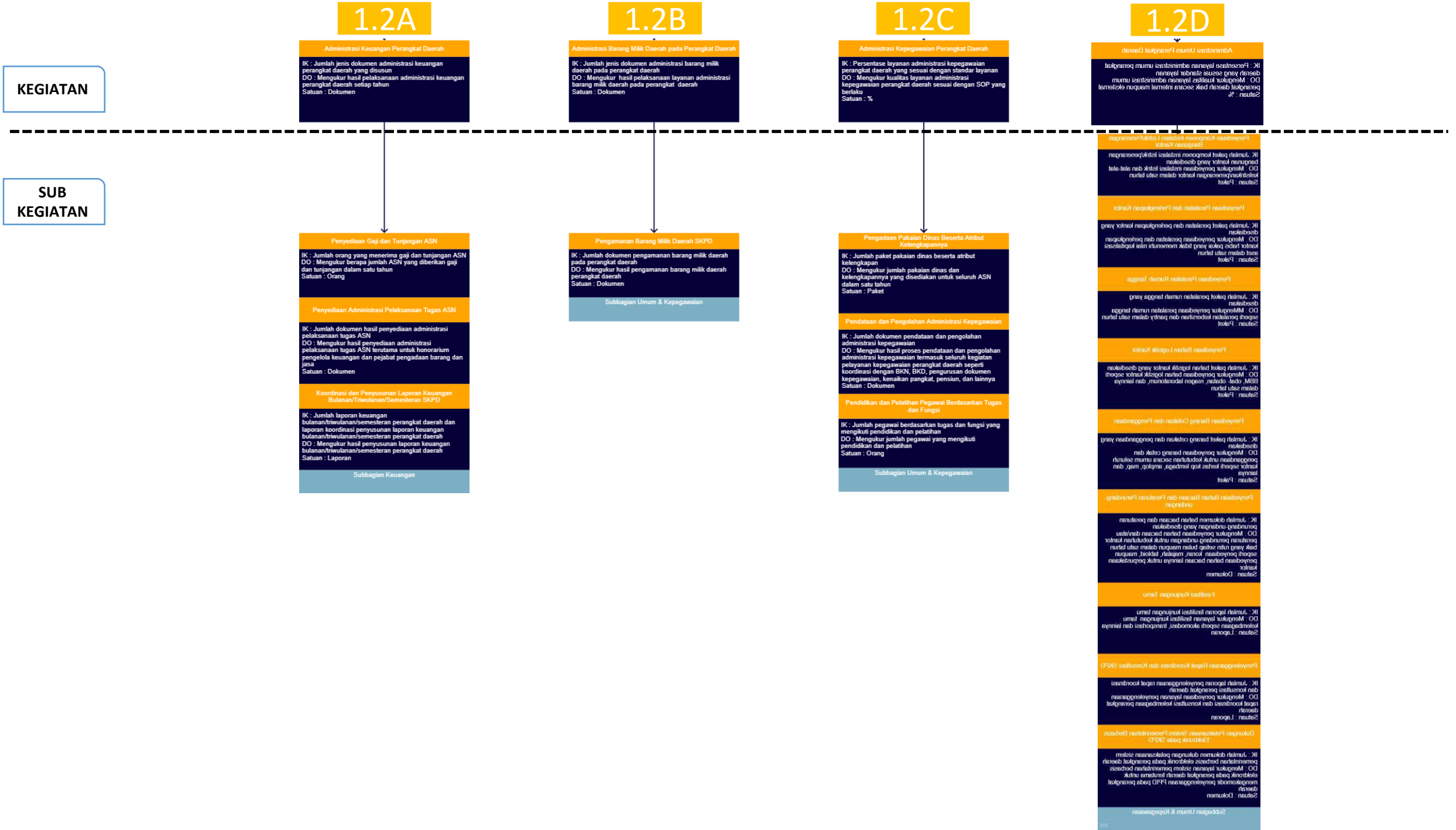
1.2A
1.2B
1.2C
1.2D
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
IK : Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun
DO : Mengukur hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah setiap tahun
Satuan : Dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
IK : Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
DO : Mengukur hasil pelaksanaan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
Satuan : Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
IK : Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan
DO : Mengukur kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan SOP yang berlaku
Satuan : %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
IK : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
DO : Mengukur berapa jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam satu tahun
Satuan : Orang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
IK : Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
DO : Mengukur hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN terutama untuk honorarium pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa
Satuan : Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
IK : Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah
DO : Mengukur hasil penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah
Satuan : Laporan
Subbagian Keuangan
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
IK : Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah
DO : Mengukur hasil pengamanan barang milik daerah perangkat daerah
Satuan : Dokumen
Subbagian Umum & Kepegawaian
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
IK : Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan
DO : Mengukur jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan untuk seluruh ASN dalam satu tahun
Satuan : Paket
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
IK : Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
DO : Mengukur hasil proses pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian termasuk seluruh kegiatan pelayanan kepegawaian perangkat daerah seperti koordinasi dengan BKN, BKD, pengurusan dokumen kepegawaian, kenaikan pangkat, pensiun, dan lainnya
Satuan : Dokumen
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
IK : Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
DO : Mengukur jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Satuan : Orang
Subbagian Umum & Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah
IK : Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan
DO : Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal
Satuan : %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
IK : Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan instalasi listrik dan alat-alat kelistrikan/penerangan kantor dalam satu tahun
Satuan : Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
IK : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor baik dalam satu tahun
Satuan : Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
IK : Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
DO : MMengukur penyediaan peralatan rumah tangga seperti peralatan kebersihan dan pantry dalam satu tahun
Satuan : Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
IK : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan bahan logistik kantor seperti BBM, obat- obatan, reagen laboratorium, dan lainnya dalam satu tahun
Satuan : Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
IK : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk kebutuhan secara umum seluruh kantor seperti kertas foto lembaga, amplop, map, dan lainnya
Satuan : Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
IK : Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan bahan bacaan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan kantor baik yang rutin setiap bulan maupun dalam satu tahun seperti penyediaan koran, majalah, tabloid, maupun penyediaan bahan bacaan lainnya untuk perpustakaan kantor
Satuan : Dokumen
Fasilitasi Kunjungan Tamu
IK : Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
DO : Mengukur layanan fasilitasi kunjungan tamu kelembagaan seperti silaturahmi, transportasi dan lainnya
Satuan : Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
IK : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
DO : Mengukur penyediaan layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelembagaan perangkat daerah
Satuan : Laporan
Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
IK : Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah
DO : Mengukur layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah tersedia untuk mendukung penyelenggaraan PPID pada perangkat daerah
Satuan : Dokumen
Subbagian Umum & Kepegawaian

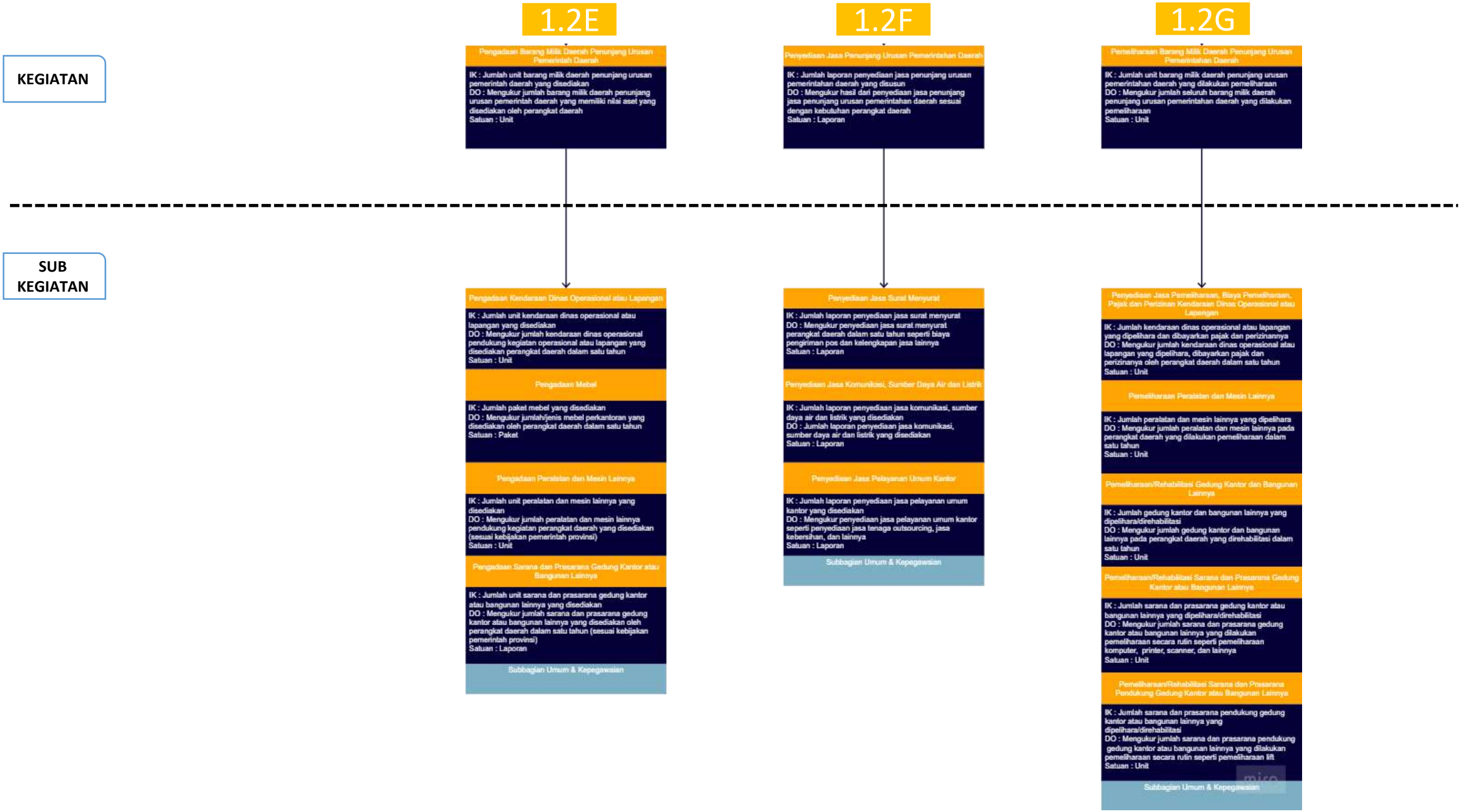
1.2E
1.2F
1.2G
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan
DO : Mengukur jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset yang disediakan oleh perangkat daerah
Satuan : Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun
DO : Mengukur hasil dari penyediaan jasa penunjang jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah
Satuan : Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan
DO : Mengukur jumlah seluruh barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan
Satuan : Unit
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
IK : Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan
DO : Mengukur jumlah kendaraan dinas operasional pendukung kegiatan operasional atau lapangan yang disediakan perangkat daerah dalam satu tahun
Satuan : Unit
Pengadaan Mebel
IK : Jumlah paket mebel yang disediakan
DO : Mengukur jumlah/jenis mebel perkantoran yang disediakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun
Satuan : Paket
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
DO : Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pendukung kegiatan perangkat daerah yang disediakan (sesuai kebijakan pemerintah provinsi)
Satuan : Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IK : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
DO : Mengukur jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun (sesuai kebijakan pemerintah provinsi)
Satuan : Laporan
Subbagian Umum & Kepegawaian
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
DO : Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya
Satuan : Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
DO : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
Satuan : Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan jasa pelayanan umum kantor seperti penyediaan jasa tenaga outsourcing, jasa kebersihan, dan lainnya
Satuan : Laporan
Subbagian Umum & Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
IK : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
DO : Mengukur jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinanya oleh perangkat daerah dalam satu tahun
Satuan : Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
DO : Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pada perangkat daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun
Satuan : Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IK : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
DO : Mengukur jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya pada perangkat daerah yang direhabilitasi dalam satu tahun
Satuan : Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IK : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
DO : Mengukur jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan secara rutin seperti pemeliharaan komputer, printer, scanner, dan lainnya
Satuan : Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IK : Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
DO : Mengukur jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan secara rutin seperti pemeliharaan lift
Satuan : Unit
Subbagian Umum & Kepegawaian

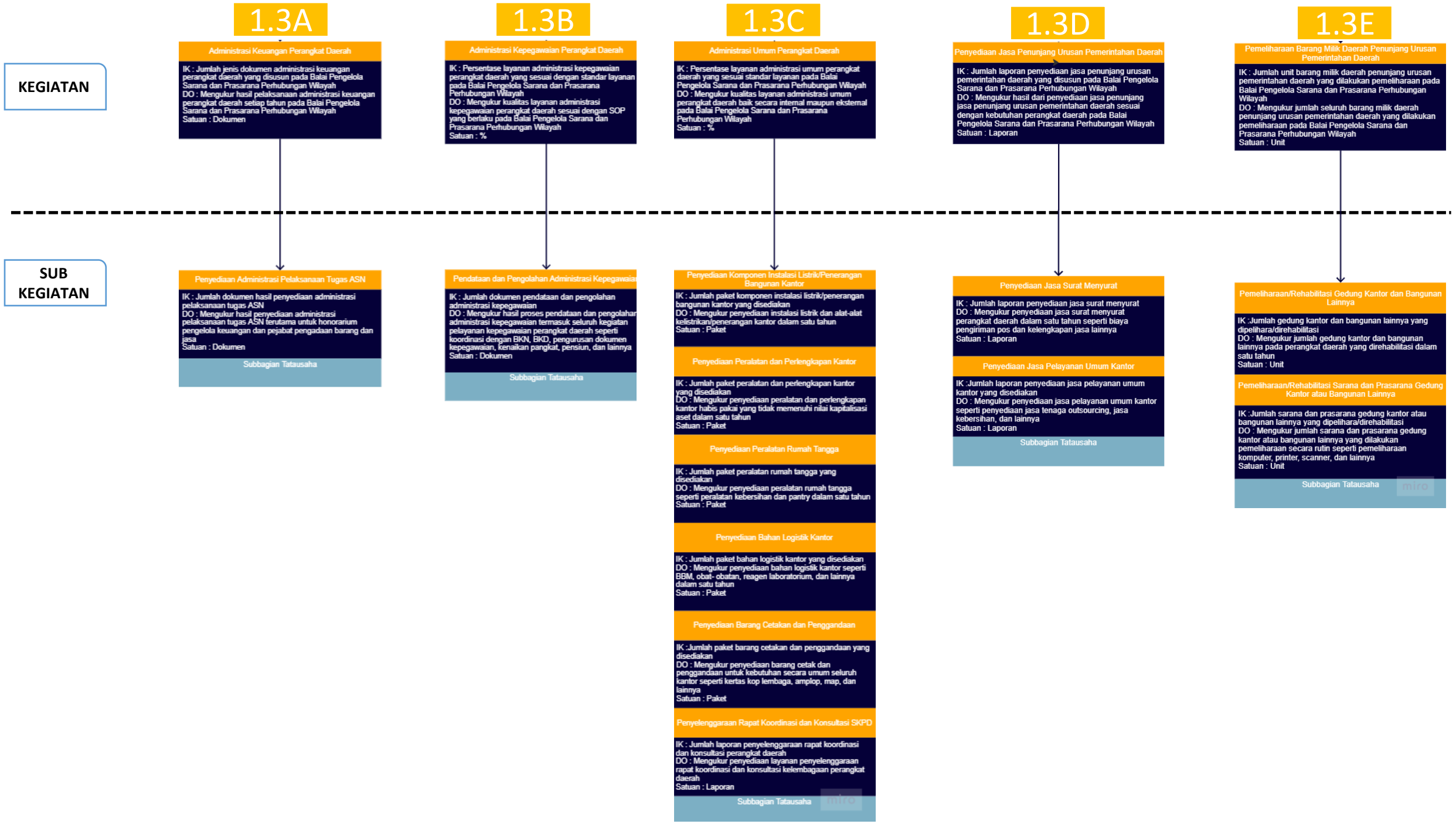
1.3A
1.3B
1.3C
1.3D
1.3E
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
IK : Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah setiap tahun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
IK : Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai dengan SOP yang berlaku pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : %
Administrasi Umum Perangkat Daerah
IK : Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur hasil dari penyediaan jasa penunjang jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
IK : Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
DO : Mengukur jumlah seluruh barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah
Satuan : Unit
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
IK : Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
DO : Mengukur hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN terutama untuk honorarium pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa
Satuan : Dokumen
Subbagian Tatausaha
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
IK : Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
DO : Mengukur hasil proses pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian termasuk seluruh kegiatan pelayanan kepegawaian perangkat daerah seperti koordinasi dengan BKN, BKD, pengurusan dokumen kepegawaian, kenaikan pangkat, pensiun, dan lainnya
Satuan : Dokumen
Subbagian Tatausaha
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
IK : Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan instalasi listrik dan alat-alat kelistrikan/penerangan kantor dalam satu tahun
Satuan : Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
IK : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset dalam satu tahun
Satuan : Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
IK : Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan peralatan rumah tangga seperti peralatan kebersihan dan pantry dalam satu tahun
Satuan : Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
IK : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan bahan logistik kantor seperti BBM, obat- obatan, reagen laboratorium, dan lainnya dalam satu tahun
Satuan : Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
IK :Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk kebutuhan secara umum seluruh kantor seperti kertas kop lembaga, amplop, map, dan lainnya
Satuan : Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
IK : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
DO : Mengukur penyediaan layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelembagaan perangkat daerah
Satuan : Laporan
Subbagian Tatausaha
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
IK : Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
DO : Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya
Satuan : Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
IK :Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
DO : Mengukur penyediaan jasa pelayanan umum kantor seperti penyediaan jasa tenaga outsourcing, jasa kebersihan, dan lainnya
Satuan : Laporan
Subbagian Tatausaha
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IK :Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
DO : Mengukur jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya pada perangkat daerah yang direhabilitasi dalam satu tahun
Satuan : Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IK :Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
DO : Mengukur jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan secara rutin seperti pemeliharaan komputer, printer, scanner, dan lainnya
Satuan : Unit
Subbagian Tatausaha
miro

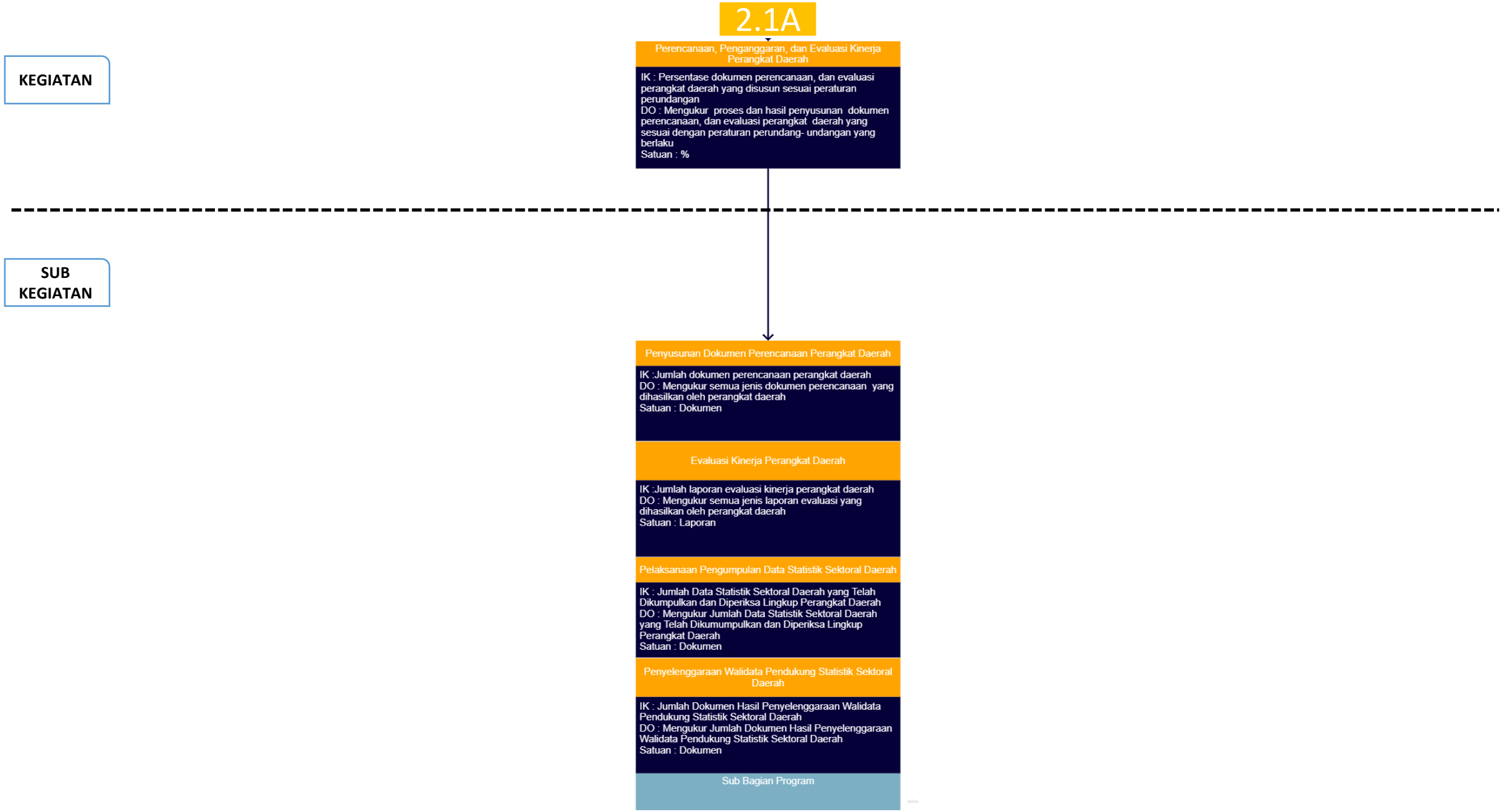
2.1A
KEGIATAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
IK : Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan
DO : Mengukur proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
Satuan : %
SUB KEGIATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK :Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
DO : Mengukur semua jenis dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh perangkat daerah
Satuan : Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
IK :Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
DO : Mengukur semua jenis laporan evaluasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah
Satuan : Laporan
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
IK : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
DO : Mengukur Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
Satuan : Dokumen
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
DO : Mengukur Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Satuan : Dokumen
Sub Bagian Program

Lampiran III : Manajemen Resiko Rencana Strategis
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

Tabel 1. Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah	Rasio Konektivitas Provinsi	berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP	Risiko Operasional	Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi)	Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa	Masyarakat
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi	Risiko Operasional	1. Human Error ; 2. Ketidak laikan kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan	Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas	Masyarakat

Tabel 2. Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP	3	3	9	Belum ada	Evaluasi Jaringan Trayek dan Tarif	Belum memadai	3	3	9
Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi	5	3	15	Ada	1. Sosialisasi, Edukasi dan Pelatihan ; 2. Ramp Check dan Uji berkala kendaraan 3. Pemantauan Kondisi cuaca dan mitigasi bencana; 4. Pemasangan rambu peringatan 5. Pemenuhan Fasilitas keselamatan secara bertahap	Memadai	4	3	12

Tabel 3. Daftar Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
3	9	Kepala Dinas Perhubungan	Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi)	Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa
1	12	Kepala Dinas Perhubungan	1. Human Error ; 2. Ketidak laikan kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan	Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas

Tabel 4. Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP	9	Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi)	Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa	Evaluasi Jaringan Trayek dan Tarif	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun
Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi	12	1. Human Error ; 2. Ketidak laikan kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan	Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas	Peningkataan koordinasi dengan istansi terkait untuk kecepatan respon penanganan, Sosialisasi call center fasilitas kesehatan, Sosilisasi pertolongan pertama terhadap penanganan kecelakan	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL

PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN DIGITAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025 - 2029

DISKOMDIGI

024 831914
diskominfo.jateng.go.id
Jl. Menteri Supeno 1/2, Kota Semarang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.3.1 Maksud 7
1.3.2 Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKOMDIGI PROVINSI JAWA TENGAH **9**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 19
2.2.1 Kondisi Kepegawaian 19
2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana 23
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 49
2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah 53
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **57**
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komdigi Jawa Tengah 57
3.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 57
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi, dengan aktivitas riil perangkat daerah : 58
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah 62
3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah 68
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **65**
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Diskomdigi Prov. Jateng 65
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Diskomdigi Prov. Jateng 191
BAB V PENUTUP **200**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rincian ASN & Non-ASN per Bidang Berdasarkan Jenis Kelamin 19
Tabel 2. 2 Pegawai Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur.....20
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai ASN Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan. 21
Tabel 2. 4 Pegawai dengan Jabatan Fungsional Diskomdigi Prov. Jateng.....22
Tabel 2. 5 Pegawai dengan Jabatan Fungsional Diskomdigi Prov. Jateng.....22
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskomdigi Prov. Jateng. 24
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 48
Tabel 2. 8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....51
Tabel 2. 9 Perumusan Isu Strategis Diskomdigi Prov. Jateng.....53
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskomdigi.....60
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran serta Indikator yang Berkaitan Dengan Kesekretariatan.....61
Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 62
Tabel 3. 4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah 64
Tabel 3. 5 Manajemen Risiko Strategis Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah.....68
Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Diskomdigi Prov. Jateng 72
Tabel 4. 2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 186
Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 192
Tabel 4. 4 Indikator Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 194
Tabel 4. 5 Tabel Indikator Kinerja Kunci.....197

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renstra 2
Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....4
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dikomdigi Prov. Jateng.....10
Gambar 2. 2 Pegawai ASN Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan 21
Gambar 2. 3 Aset Bangunan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah.....23
Gambar 2. 4 Capaian Bidang IKP Diskominfo Prov. Jateng.....43
Gambar 2. 5 Capaian Bidang Statistik Diskominfo Prov. Jateng 44
Gambar 2. 6 Capaian Bidang Teknologi Informasi Teknologi Diskominfo Prov. Jateng.....45
Gambar 2. 7 Capaian Bidang E-Government Diskominfo Prov. Jateng.....46
Gambar 2. 8 Capaian Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Prov. Jateng 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa untuk mencapai tujuan negara secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Keterpaduan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Rencana pembangunan harus selaras antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Keberadaan unit kerja pada pemerintah daerah merupakan salah satu motor penggerak pembangunan di daerah, sehingga setiap unit kerja atau organisasi perangkat daerah harus memiliki rencana strategis pembangunan yang tersinkronisasi dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah (Renstra Diskomdigi), merupakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan kepala daerah, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJMD.

Renstra Diskomdigi memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Renstra berperan dalam mengarahkan kinerja organisasi agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan kepala daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RENJA) perangkat daerah, sehingga program kegiatan tahunan yang direncanakan lebih terarah dan

konsisten, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan. Dengan adanya Renstra mampu mendorong akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi kinerja Diskomdigi dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025–2029. Tahapan penyusunan Renstra PD meliputi tahapan persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan awal Renstra PD, Penyampaian Ranwal RPJMD kepada PD, Penyampaian Rancangan Renstra PD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas PD, verifikasi rancangan Renstra PD, perumusan rancangan akhir, Reviu APIP, verifikasi rancangan akhir Renstra PD, hingga penetapan Perkada Renstra PD.

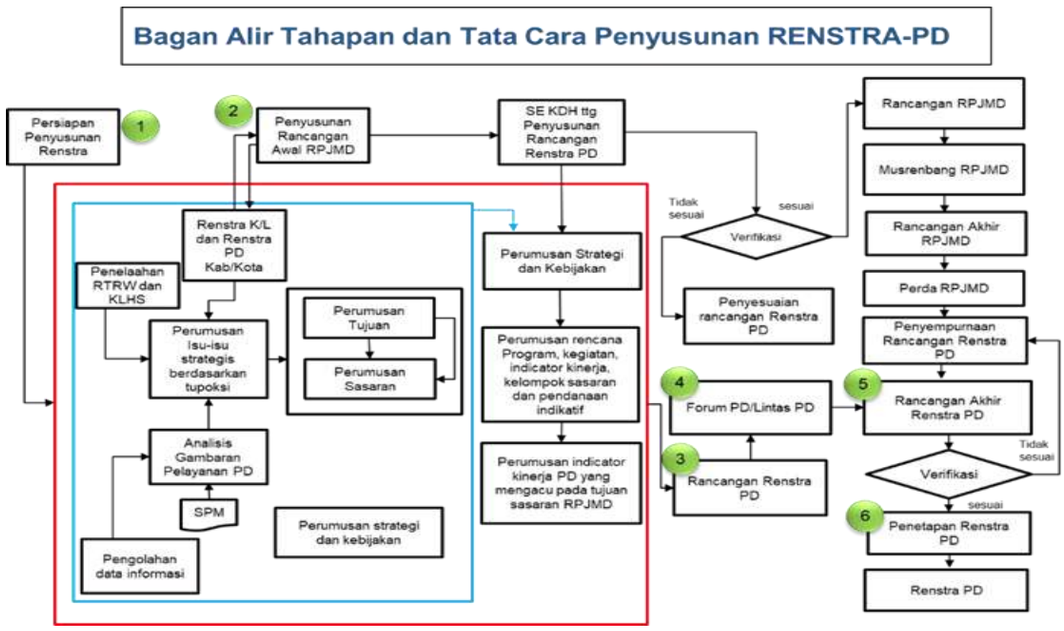

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renstra

Sebagai bagian dari sinkronisasi, Renstra Dinas Komdigi Prov. Jateng harus selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan pada 6 (enam) misi, yaitu:

1) Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;
2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;
3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2025-2026 merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional, RPJMD yang disusun digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra PD. Renstra PD secara hierarki berkedudukan dibawah RPJMD, dengan kata lain Renstra PD merupakan terjemahan RPJMD ke dalam perencanaan perangkat daerah, sehingga rencana kegiatan PD yang disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dimaksud dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

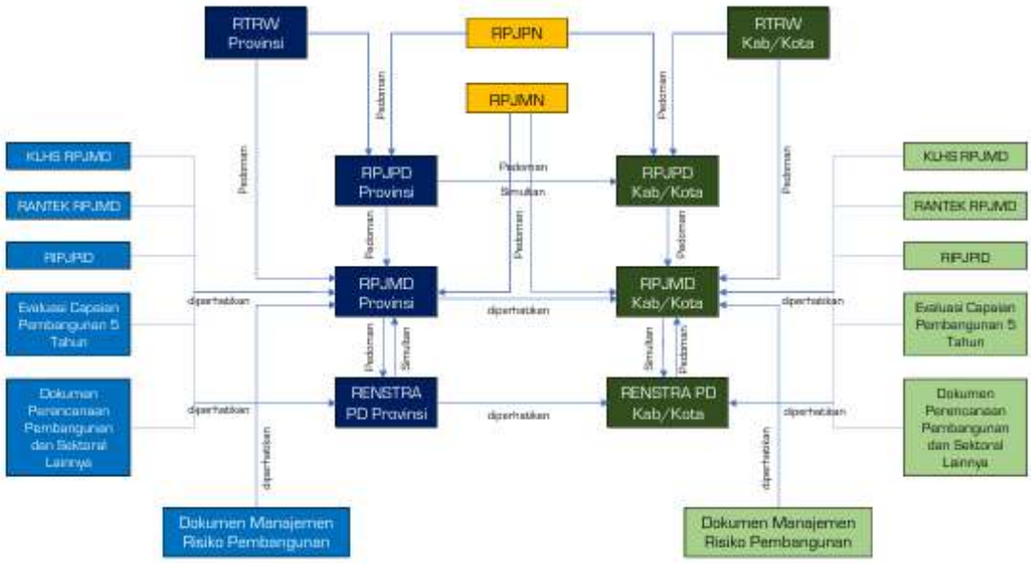

Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Dalam rangka menguatkan era pemerintahan digital pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan digitalisasi tata kelola pemerintah pada periode sebelumnya dan sekarang berada pada tahap pembangunan layanan terintegrasi dan berkelanjutan yang diwujudkan melalui implementasi Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, antara lain Pelaksanaan integrasi aplikasi yang dimulai dari pemetaan aplikasi, pembelian lisensi, metode, arsitektur layanan, tenaga ahli/tim ahli, help desk, rapat koordinasi; Implementasi Pencegahan dan Pengamanan Informasi dari ancaman insiden siber oleh Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) di Pemprov Jateng;

Keberadaan Renstra Dinas Komdigi mendukung capaian target RPJMD Jawa Tengah, yang juga termanifestasikan pada program prioritas Gubernur. Adapun dukungan program/kegiatan Diskomdigi untuk mencapai target kinerja Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 yaitu:

1. Integrasi Aplikasi pelayanan ke dalam Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN): Penyusunan Peraturan Gubernur dan Integrasi Aplikasi;
2. Smart Response diwujudkan dengan Call Center 24 jam “Jateng Ngopeni Nglakoni”, dan menyiapkan kebutuhan SDM di Pusat dan PPID serta Merubah Peraturan Gubernur terkait dengan PPID;
3. Pemenuhan dan Peningkatan akses internet gratis baik di desa (102 desa blankspot) maupun untuk internet sektor publik pada koperasi merah putih, internet sektor pendidikan, serta internet kecamatan berdaya;
4. Mendorong terwujudnya integrasi Satu Data Jateng: Penyelenggaran proses bisnis Satu Data Jateng sesuai dengan ketentuan dan mewujudkan program Big Data atau integrasi data;

5. Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “Cyber Security Jawa Tengah” dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK berupa penyusunan peraturan gubernur, identifikasi ahli IT, pembentukan satgas.

Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan Renstra Tahun 2025 - 2029 secara bertahap dan berkesinambungan melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, serta program pengelolaan aplikasi informatika, dan didukung program pada urusan persandian maupun pengelolaan data statistik yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa pasal 3 (d) disebutkan pembentukan perangkat daerah meliputi poin 13 Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Perda yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2025, maka keberadaan Dinas Kominfo berubah nama menjadi Dinas Komunikasi Informatika dan Digital atau Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah. Secara kewenangan Diskomdigi mengelola tugas dan fungsi menggantikan dinas lama Diskomdigi, meskipun pembagian tugas fungsi struktur bidang dan unit di bawahnya berbeda. Dengan demikian Renstra unit kerja 2025-2029 mengenai urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik menjadi Renstra yang mendukung terwujudnya pelayanan publik berbasis digital di Jawa Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah:

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
4. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnsi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri PAN dan RB PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pentunjuk Penyusunan IKU;
18. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan);

20. Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 2 tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025–2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk memberikan arah strategis dan menjadi pedoman perangkat daerah dalam periode lima tahun ke depan dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah :

a. Menjadi pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan.
b. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan untuk periode 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini memuat tentang Gambaran pelayanan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah meliputi : tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta permasalahan pelayanan dan isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan agar lebih terarah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta kinerja, target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan atau indikator kinerja program pada masing masing urusan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansi kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKOMDIGI PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Diskominfo Provinsi Jawa Tengah pada awal berdirinya dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.70 Tahun 2016, kemudian perbaharui kembali berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 55 Tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2025 Gubernur Jawa Tengah melaksanakan percepatan penataan kelembagaan perangkat daerah melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025, dimana nomenklatur yang baru yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah dengan Tipe A dan kewenangannya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian

a. Perumusan kebijakan Bidang Komunikasi Publik dan Media, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E- Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;

b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;

c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah, sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Diskomdigi yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Komunikasi Publik dan Media, Bidang Pengelolaan Data dan Statistik, Bidang Infrastruktur Teknologi Digital, Bidang Aplikasi Pemerintah Digital, Bidang Persandian dan Keamanan Siber, UPT Pusat Data serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar dibawah.

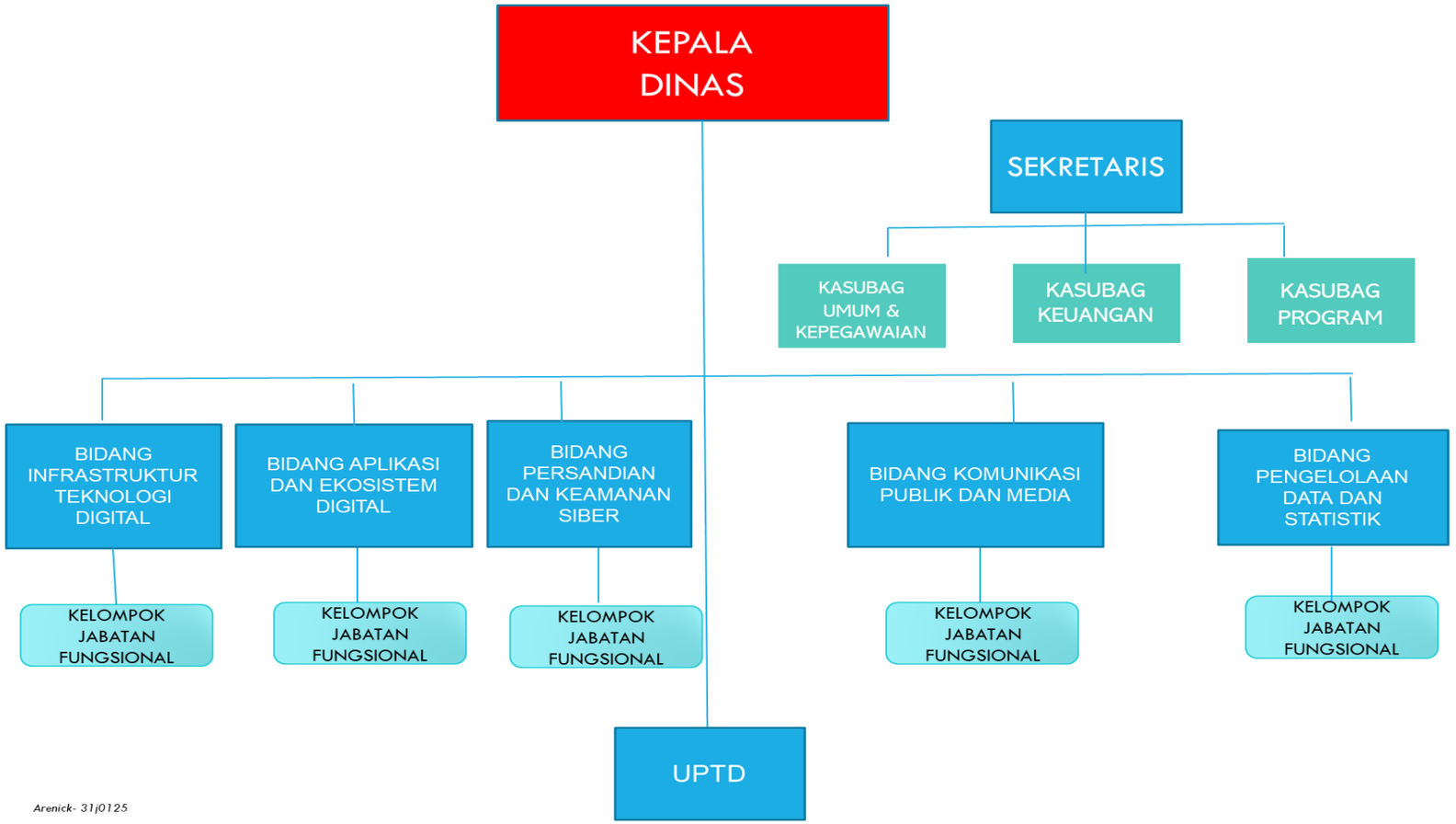

Gambar 2. 1 *Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah*

Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. **Sekretariat**

Sekretariat memiliki tugas dan fungsi melaksanakan dukungan Administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi:
   1. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
   2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
   3. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
   4. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
   5. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
   6. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
   7. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian yaitu Program, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

   1. Subbagian Program : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program;

   2. Subbag Keuangan : melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;

3. Subbag Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. **Bidang Komunikasi Publik dan Media**

Bidang Komunikasi Publik dan Media memliki tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pengelolaan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

a. Tugas:

Menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan lembaga dan kehumasan, analisis isu dan pendapat masyarakat, serta pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi krisis pemerintah dan ekosistem media informasi dan dokumentasi.

b. Fungsi:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan lembaga komunikasi dan kehumasan, analisis isu dan pendapat masyarakat, serta pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi krisis pemerintah dan ekosistem media informasi dan dokumentasi;

2. Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM kehumasan dan fasilitasi, pembinaan Infrastruktur kemitraan lembaga komunikasi dan kehumasan, analisis isu dan pendapat masyarakat, serta pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi krisis pemerintah dan ekosistem media informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten/Kota;

3. Monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan lembaga komunikasi dan kehumasan, analisis isu dan pendapat masyarakat, pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi krisis pemerintah serta ekosistem media informasi dan dokumentasi;

4. Pelaporan dan rekomendasi di bidang kemitraan lembaga komunikasi dan kehumasan, analisis isu dan pendapat masyarakat, serta pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi krisis pemerintah dan ekosistem media informasi dan dokumentasi.

c. Pokja di Bidang Komunikasi Publik dan Media terdiri atas 3 (tiga) yaitu :

1. Pokja Analisis Isu, Kemitraan dan Kehumasan : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan pemberdayaan komunitas informasi, forum komunikasi media tradisional dan kelompok kehumasan;

2. Pokja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan permohonan informasi;

3. Pokja Pengelolaan Komunikasi Publik dan Relasi Media : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan pengelolaan publikasi media.

3. **Bidang Pengelolaan Data dan Statistik**

Bidang Pengelolaan Data dan Statistik melaksanakan tugas dan fungsi mengelola data Statistik Sektoral dan Geospasial di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

a. Tugas:

Menyelenggarakan persiapan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang Informasi Geospasial Tematik, Data Statistik Sektoral dan Tata Kelola Satu Data Jawa Tengah.

b. Fungsi:

1. Penyiapan rencana kerja di bidang Informasi Geospasial Tematik, Data Statistik Sektoral dan Tata Kelola Satu Data Jawa Tengah di Daerah; Pelaksanaan Fasilitasi layanan Informasi Geospasial Tematik, Data Statistik Sektoral dan Tata

Kelola Satu Data Jawa Tengah;

2. Monitoring dan evaluasi di bidang Informasi Geospasial Tematik, Data Statistik Sektoral dan Tata Kelola Satu Data Jawa Tengah;
3. Pelaporan dan rekomendasi di bidang Informasi Geospasial Tematik, Data Statistik Sektoral dan Tata Kelola Satu Data Jawa Tengah;

c. Pokja di Bidang Pengelolaan Data dan Statistik terdiri atas 3 (tiga) yaitu:

1 Pokja Pengelolaan Data Geospasial : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan tata kelola Data Geospasial Pemerintah Provinsi;

2 Pokja Pengelolaan Integrasi Data: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan integrasi dan kompilasi data sektoral;

3 Pokja Tata Kelola Data Statistik : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan selaku Walidata Jateng;

4. **Bidang Infrastruktur Teknologi Digital**

Bidang Infrastruktur Teknologi Digital melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan dan layanan Infrastruktur Digital

a. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur, Strategi dan Akselerasi Infrastruktur Digital, serta Layanan Infrastruktur digital.

b. Fungsi:

1. Perumusan kebijakan mengenai Pengembangan Infrastruktur dan Perangkat Digital di daerah, strategi akselerasi teknologi digital, sistem elektronik publik, audit TIK, pendaftaran sistem elektronik publik (domain), fasilitasi bandwith internet pemerintah daerah, layanan perbaikan dan pengelolaan

jaringan antar OPD, pengelolaan teknologi infrastruktur baru;

2. Pelaksanaan kebijakan terkait Pengembangan Infrastruktur dan Perangkat Digital di daerah, strategi akselerasi teknologi digital, sistem elektronik publik, audit TIK, pendaftaran sistem elektronik publik (domain), fasilitasi bandwith internet pemerintah daerah, layanan perbaikan dan pengelolaan jaringan antar OPD, pengelolaan teknologi infrastruktur baru di daerah;
3. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penyusunan, pelaksanaan, maupun evaluasi mengenai Pengembangan Infrastruktur dan Perangkat Digital di daerah, strategi akselerasi teknologi digital, sistem elektronik publik, audit TIK, pendaftaran sistem elektronik publik (domain), fasilitasi bandwith internet pemerintah daerah, layanan perbaikan dan pengelolaan jaringan antar OPD, pengelolaan teknologi infrastruktur baru;
4. Monitoring dan evaluasi mengenai Pengembangan Infrastruktur dan Perangkat Digital di daerah, strategi akselerasi teknologi digital, sistem elektronik publik, audit TIK, pendaftaran sistem elektronik publik (domain), Fasilitasi bandwith internet pemerintah daerah, layanan perbaikan dan pengelolaan jaringan antar OPD, pengelolaan teknologi infrastruktur baru.

c. Pokja di Bidang Infrastruktur Teknologi Digital terdiri atas 3 (tiga) yaitu:

1. Pokja Pengelolaan Infrastruktur Digital : pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemantauan infrastruktur digital berupa jaringan fiber optik dan backbone terkoneksi antara OPD Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Pokja Strategi dan akselerasi Infrastruktur Digital : pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemantauan strategi akselerasi teknologi digital melalui penyusunan road map infrastruktur terkoneksi;
3. Pokja Layanan infrastruktur digital : pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemantauan layanan infrastruktur digital telekomunikasi khusus.

5. **Bidang Aplikasi Pemerintah Digital**

Bidang Aplikasi Pemerintah Digital melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Aplikasi E Government, Tata Kelola SPBE, serta Layanan Ekosistem Digital

a. Tugas:

Menyelengarakan perumusan rencana kerja, pelaksanaan kebijakan, pembinaan pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian dukungan administrasi di bidang Pengembangann Aplikasi E Government, Tata Kelola SPBE, serta Layanan Ekosistem Digital .

b. Fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekosistem *E-Government*;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola *E-Government*;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

c. Pokja di Bidang Aplikasi Pemerintahan Digital terdiri atas 3 (tiga) yaitu:

1. Pokja Pengembangan Pemerintah Digital : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan pengelolaan Aplikasi Pemerintah Digital;
2. Pokja Tata Kelola Pemerintah Digital : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan capaian Indeks Pemerintah Digital / Indeks SPBE;
3. Pokja Ekosistem Pemerintah Digital : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan

maupun evaluasi dan pelaporan pembangunan ekosistem digital Pemerintah Provinsi.

6. **Bidang Persandian dan Keamanan Siber**

Bidang Persandian dan Keamanan Siber melaksanakan tugas dan fungsi bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah.

b. Fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Pokja di Bidang Persandian dan Keamanan Siber terdiri atas 3 (tiga) yaitu:

1. Pokja Tata Kelola Persandian : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;

2. Pokja Pengamanan Persandian dan Informasi : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;

3. Pokja Sistem Komunikasi Intra Pemerintah : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah.

7. **UPT Pusat Data**

UPT Pusat Data memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Instansi lain serta pihak lain

a. Tugas :

Melaksanakan tugas teknis operasional dan layanan serta kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Instansi lain serta pihak lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional dan layanan di idang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika;
2. Perumusan kebijakan teknis operasional dan layanan di bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika;
3. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan layanan di bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika;
4. Evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika;
5. Pembinaan dan pelatihan teknis di bidang pengelolaan pusat data dan sarana informatika;
6. Pengelolaan ketatausahaan; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Data mempunyai tugas :

1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
3. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
5. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
6. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai sampai dengan Semester I tahun 2025, tercatat sebanyak 225 orang dengan jumlah ASN sebanyak 118 orang dan Non ASN sebanyak 107 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 ***Rincian ASN & Non-ASN per Bidang Berdasarkan Jenis Kelamin***

Unit Kerja	PNS		PPPK		Non ASN		Grand Total
	L	P	L	P	L	P	
SEKRETARIAT	8	15	4	5	18	3	53
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7	7	3	4	16	6	43
BIDANG STATISTIK	7	6	1		11	3	28
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	10	4		1	6	2	23
BIDANG E-GOVERNMENT	7	6	5		19	10	47
BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	11	3	1		10	2	27
Grand Total	**50**	**41**	**14**	**10**	**80**	**26**	**221**

Sumber: Dinas Komdigi, Oktober 2025 (menggunakan nama bidang Diskomdigi yang lama) Berdasarkan data kondisi kepegawaian Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Juni 2025, total pegawai ASN dan Non ASN sebanyak 260 orang, terdiri dari 169 (65%) laki laki dan 91 (35%) orang perempuan, menjalankan tusi Diskomdigi sesuai dengan bidangnya masing masing, Kondisi kepegawaian pada Diskomdigi tidak sesuai dengan

kuota pada peta jabatan sehingga membutuhkan tambahan pegawai yang berkompeten. Sedangkan non asn terdiri dari tenaga ahli dan calon PPPK paruh waktu.

a. Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan umur

Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin dan umur kondisi Oktober 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2 ***Pegawai Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur***

UNIT KERJA	RANGE USIA								JUMLAH
	20-30		31-40		41-50		51-60		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SEKRETARIAT	4	5	12	3	8	9	6	6	**53**
BIDANG IKP	6	8	12	6	5	3	3		**43**
BIDANG STATISTIK	10	2	2	5	4	2	3		**28**
BIDANG TIK	4	3	9	2	3	2			**23**
BIDANG E-GOV	8	8	17	6	5	1	1	1	**47**
BIDANG PDKI	7	1	7	2	5		3	2	**27**
	39	**27**	**59**	**24**	**30**	**17**	**16**	**9**	**221**

Berdasarkan Gambar 2.1 dan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Dan dapat dilihat pula Sebagian besar pegawai di rentang umur 26 sampai dengan 35 tahun.

b. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan (Oktober 2025), dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2.

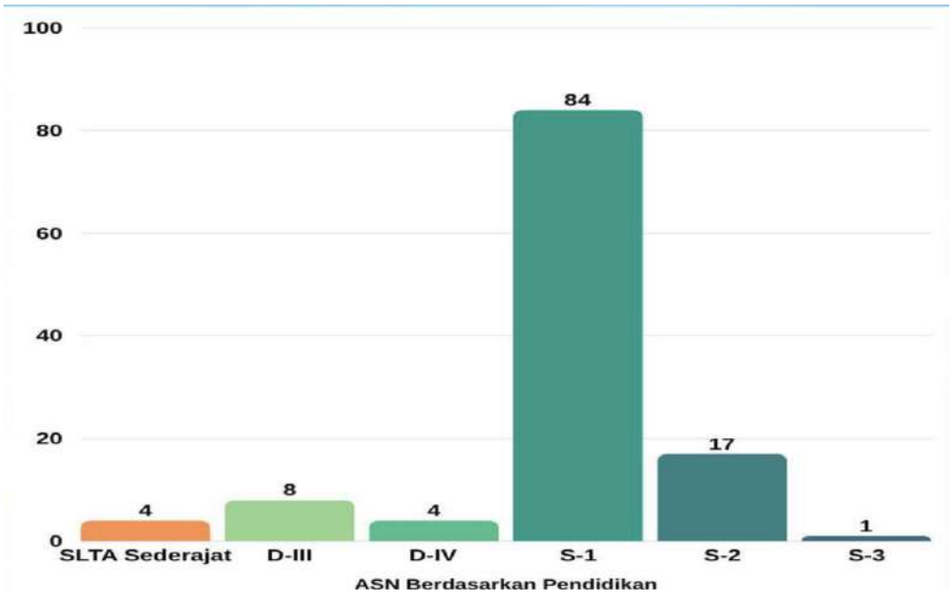

Gambar 2. 2 ***Pegawai ASN Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan***

sumber: Buku Saku Pegawai Dinas Komdigi Semester I - 2025

Tabel 2. 3 ***Jumlah Pegawai ASN Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.***

Bidang	S3		S2		S1		D-IV		D3		SLTA		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Sekretariat	1		2	3	5	10	1		1		6	1	16	14
TIK			3	1	8	3							11	4
PDKI			3		4	5	1		2		1	2	11	7
IKP			3	1	6	7				1			9	9
E-GOV			1	1	5	6			1				7	7
STATISTIK			3		5	10		1		1			8	12
TOTAL	1		15	6	33	41	2	1	4	2	7	3	62	53

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Doktor (S3) dengan sebagian besar pegawai ASN berpendidikan S1 (64.35%) dan S2 (18.26%).

c. Jabatan Fungsional Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 71 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, berikut gambaran pegawai

dengan jabatan fungsional di Diskomdigi per Oktober 2025 pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 4 ***Pegawai dengan Jabatan Fungsional Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah***

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	INSTANSI PEMBINA
1	PRANATA KOMPUTER	32 ORANG	BPS
2	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	16 ORANG	KEMENKOMDIGI
3	SANDIMAN	4 ORANG	BSSN
4	MANGGALA INFORMATIKA	1 ORANG	BSSN
5	STATISTISI	7 ORANG	BPS
6	SURVEYOR PEMETAAN	1 ORANG	BMKG
7	ANALIS SDM APARATUR	2 ORANG	BKN
8	ARSIPARIS	2 ORANG	ANRI
9	PERENCANA	1 ORANG	BAPPENAS
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	**66 ORANG**	
10	PELAKSANA UMUM	42 ORANG	
11	STRUKTURAL	10 ORANG	

Tabel 2. 5 ***Pegawai dengan Jabatan Fungsional Diskomdigi Prov. Jateng***

Bidang	Pranata Komputer			Pranata Humas			Sandiman		Manggala Informatika	Statistisi		Jml
	Terampil	Ahli Pertama	Ahli Muda	Terampil	Ahli Pertama	Ahli Muda	Penyelia	Ahli Muda	Ahli Muda	Ahli Pertama	Ahli Muda	
Sekre	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	**5**
TIK	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PDKI	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	**5**
IKP	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	**8**
E-GOV	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
Statistik	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	3	**7**
TOTAL	**2**	**7**	**7**	**1**	**4**	**7**	**1**	**1**	**1**	**2**	**3**	**36**

2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi, tersebut meliputi ruang dan peralatan kerja, serta sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana sudah cukup memadai, namun peningkatan prasarana dan sarana masih perlu dilakukan guna meningkatkan serta mengoptimalkan kinerja.

a. Aset Bangunan Tersertifikat (Kantor Diskomdigi dan KI Jateng) .

Gambar 2. 3 Aset Bangunan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

b. Transportasi

Kendaraan roda 2 sebanyak 4 (Empat) Unit, kendaraan roda 3 sebanyak 1 (Satu) Unit, kendaraan roda 4 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Unit, dan Bus sebanyak 1 (Satu) Unit.

c. Ruang Rapat

Ruang pertemuan Dinas Komdigi meliputi Ruang PPID, Ruang Podcast, Ruang Meeting Kecil, Ruang Rapat Literasi Lantai 1, Ruang Rapat Aplikasi Lantai 4, Ruang Rapat Fiber Optik Lantai 4, dan Ruang Rapat Dharma Wanita.

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2. 6 ***Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah.***

Renstra PD Tahun 2018 - 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018 - 2023**																			
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
Tujuan																				
1.	Tujuan 1 : Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indeks SPBE	Angka				2.88	3.10	3.27	3.33		4.2	2.74	3.98	4.26		145.83	88.38	121.71	127.93	
Sasaran																				
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah																			
	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka				2.94	3.41	3.53	3.65		2.51	2.3	3.50	4.80		118.03	67.44	99.15	131.51	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka				2.51	3.71	3.83	3.95		3.71	2.5	3.10	3.90		147.81	67.36	96.61	93.73	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018 - 2023**																			
	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka				3.20	4.43	4.17	4.30		4.67	3.49	4.62	4.63		145.94	85.96	110.79	107.67	
c.1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%				40	60	70	80		40	60	75	80		100	100	107.14	100	
	Persentase aplikasi layanan publik yang terintegrasi	%				50	60	70	85		55	65	80	85		110	108.33	100	100	
c.2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.																			
	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	%				64	71	78	85		74.65	80.88	81	87.54		116.64	113.92	103.85	102,98	
	URUSAN STATISTIK																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.2	Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral																			
	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%				30.36	63.72	81.76	95.65		176.26	95.61	85.70	95.65		580.57	150.20	104.82	100.0	
C.3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.																			
	Persentase ketersediaan data sektoral.	%				79	89	95	100		169.59	89	108			211.67	100	113.68	100,74	
	Persentase Badan Publik yang terbuka.	%				76	84	92	100		76	84	92			100	100	100	100	
URUSAN PERSANDIAN																				

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.3	Sasaran 3 : Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)																			
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Angka				1	2	3	3+		2	3	3+	3+		200	150	100	100.0	
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	daerah.																			
	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	%				33.33	50	66.67	100		33.33	50	70	100		100	100	100	100	
	NON URUSAN																			
A.2	Tujuan 2 :																			
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%				52.50	62.50	72.50	81.25		81.76	82.18	82.18	87.54		155.73	131.48	113.35	107.74	
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pelayanan Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%				52.50	62.50	72.50	81.25		81.76	82.18	82.18	87.54		155.73	123.80	113.53	107.74	
	Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi																			
	Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Perangkat Daerah																			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka				58	65	72	81		80.74	80.47	81.74	81.75		139.21	123.80	113.53	100.93	
	Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi																			
	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	

Renstra PD Tahun 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B	**Renstra PD Tahun 2024 - 2026**																			
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
Tujuan																				
1.	Tujuan 1 : Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah																			
	Indeks SPBE	Angka								4.27					4.42					103.51

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Sasaran																				
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah																			
	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka								4.80					4.90					102.08
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka								3.90					4.20					107.6

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																				9

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B	**Renstra PD Tahun 2024 - 2026**																			
	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka								4,46					4,75					102,59
c.1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika														72					
	Persentase layanan pemerintahan	%								15					15					100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	berbasis elektronik yang terintegrasi																			
c.2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.																			
	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	%								78					90,14					115,56
	URUSAN STATISTIK																			
B.2	Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%								31					31					100.0
C.3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.																			
	Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	%								24					24					100
URUSAN PERSANDIAN																				
B.3	Sasaran 3 : Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Berbasis Elektronik (SPBE)																			
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Angka								3+(636)					3+(637)					100.15
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.																			
	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	%								40					40					100
	NON URUSAN																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.2	Tujuan 2 :																			
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%								68					69.61					102.36
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%								78					85.74					109.92
	Program Urusan Penunjang																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pemerintah Daerah Provinsi																			
	Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah	%								100					100					100
	Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka								2.6					2.74					105.38
	Program Urusan Penunjang Pemerintah																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Daerah Provinsi																			
	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi	%								100					100					100

Berdasarkan Tabel diatas terkait dengan capaian kinerja tujuan 1 sesuai dengan Renstra Diskominfo Prov Jateng Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Diskominfo Prov Jateng Tahun 2024 – 2026 yaitu "Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah", tidak ditemukan adanya kesenjangan/gap layanan baik di level tujuan sasaran maupun program. Pada tujuan terkait dengan Indeks SPBE, hasil evaluasi Kemenpan RB tahun 2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih angka indeks SPBE sebesar 4,42 dengan predikat "Memuaskan". Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 4,26, mengalami peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan, yaitu sebesar 0,16 poin. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SPBE dari Kemenpan RB pada 4 domain penilaian yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.

Berdasarkan Tabel Rasio terkait dengan sesuai dengan Renstra Diskominfo Prov Jateng Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Diskominfo Prov Jateng Tahun 2024 – 2026 yaitu Capaian paling tinggi sebesar 109,92% laju pemanfaatan data sektoral (**Sangat Tinggi**) pada Nilai Kepuasan Diskomdigi masyarakat Jawa Tengah, yang diukur melalui indikator Indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan capaian terendah yaitu sebesar 100% (**Sangat Tinggi**). Capaian tersebut dipengaruhi oleh instrumen pendukung kinerja program dan kegiatan yaitu : Portal Data, Dashboard Big Data, dan *Government Resource Management System* (GRMS) yang merupakan bangunan sistem aplikasi terintegrasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana sistem aplikasi ini terdiri atas sistem *e-budgeting, e-project planning*, e-HSB, e-penatausahaan, *e-delivery, e-controlling, e-monev* dan *Government Planning Handbook* (GPH), serta aplikasi *networking* yang terdiri atas *system cloud server, video/audiostreaming, DNSX filter, voip gateway server, nms, ap controller, the dude* dan inventarisasi yang mulai diterapkan di Provinsi Jawa Tengah; SOP Layanan Pusat Data; SOP Rekomendasi Teknis; SOP Fasilitasi Liputan; SOP Fasilitasi Streaming; serta SDM PNS Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah sejumlah 100 orang PNS yang terdiri dari Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat (Humas), Statistisi, Sandiman dan Fungsional Umum.

1. **Bidang Komunikasi Publik dan Media**

a.

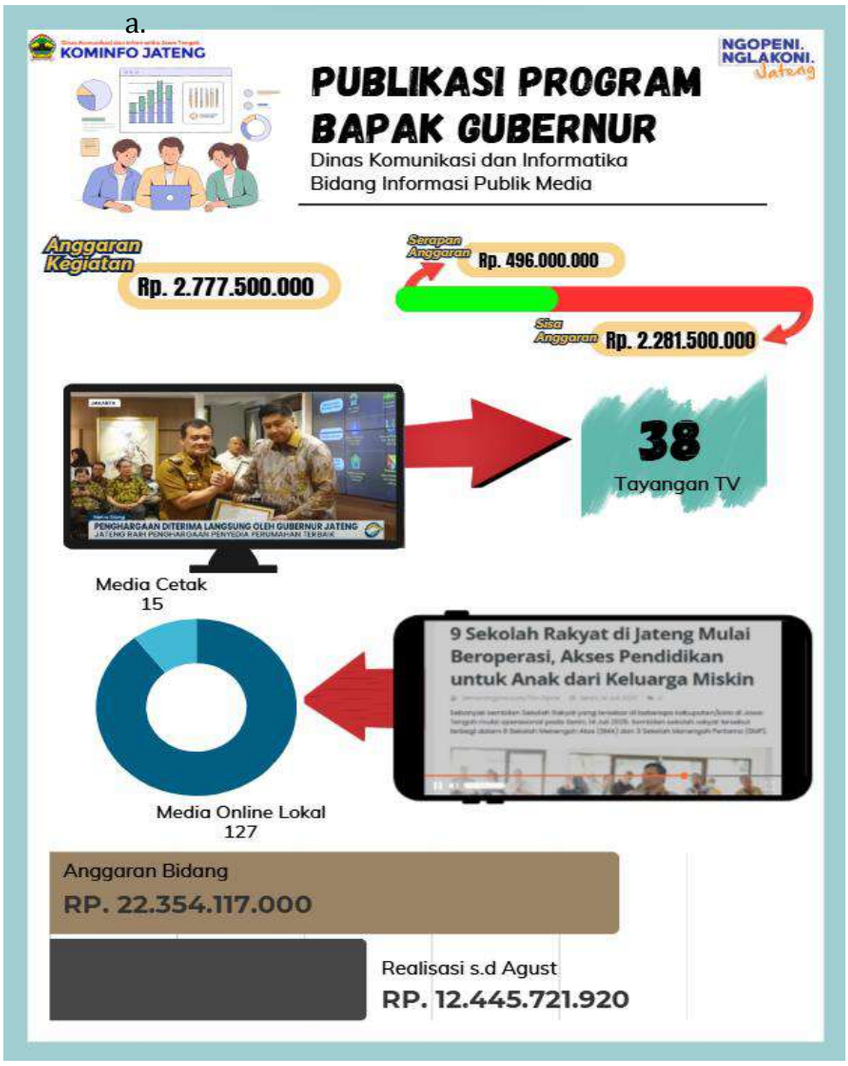

Gambar 2. 4 Capaian Bidang IKP Diskominfo Prov. Jateng

Capaian kinerja urusan Kominfo pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan program pengelolaan Informasi dan Kumunikasi Publik pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu berupa publikasi program Bapak Gubernur Jawa Tengah sebanyak : 38 tayangan TV, 15 media cetak, dan 127 media online lokal

2. **Bidang Pengelolaan Data dan Statistik**

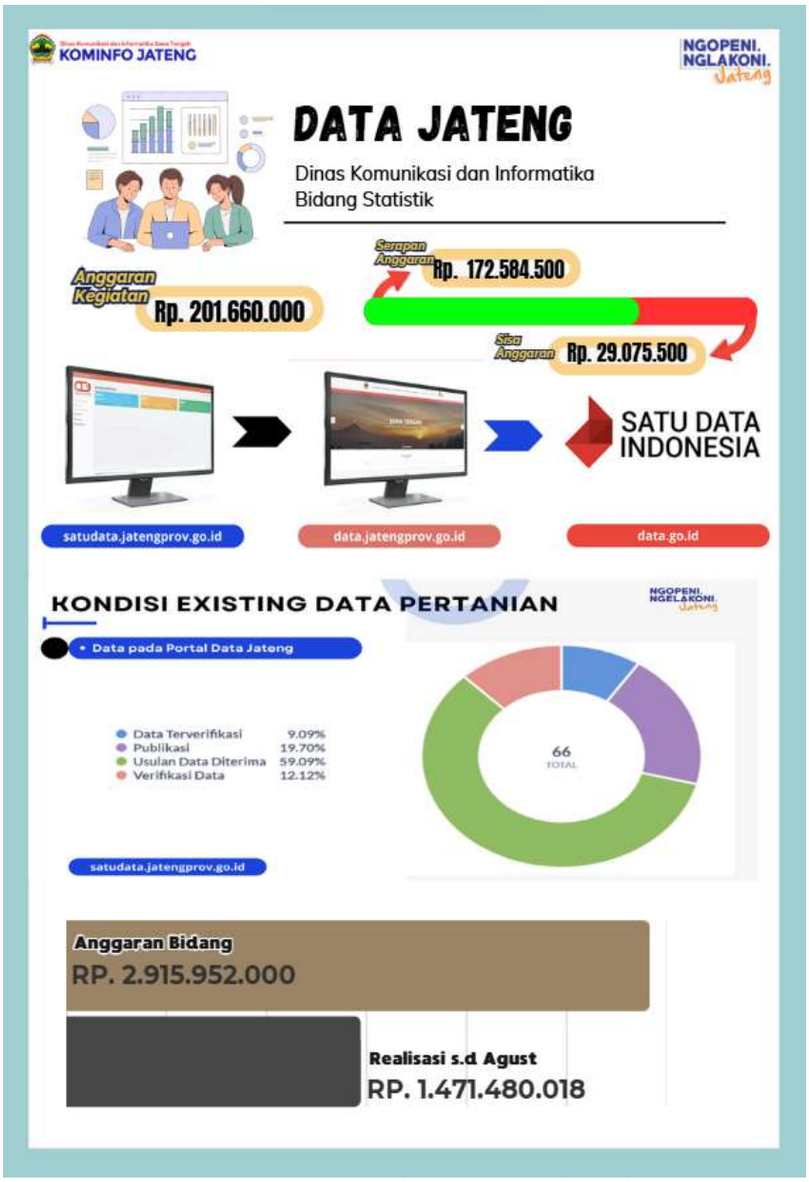

Gambar 2. 5 Capaian Bidang Statistik Diskominfo Prov. Jateng

Capaian kinerja urusan Kominfo pada bidang Statistik dan program penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu berupa Satu Data Jateng yaitu pengelolaan dan publikasi data melalui satudata.jatengprov.go.id ; data.jatengprov.go.id dan data.go.id

3. **Bidang Infrastruktur Teknologi Digital**

Gambar 2. 6 Capaian Bidang Teknologi Informasi Teknologi Diskominfo Prov. Jateng

Capaian kinerja urusan Kominfo pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu berupa Internet Gratis dengan realisasi yaitu 170 desa internet gratis, 30 area sektor publik, 37 sektor pendidikan, dimana secara akumulatif sejak tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan internet gratis sudah dilaksanakan di 837 lokasi .

4. **Bidang Aplikasi Pemerintah Digital**

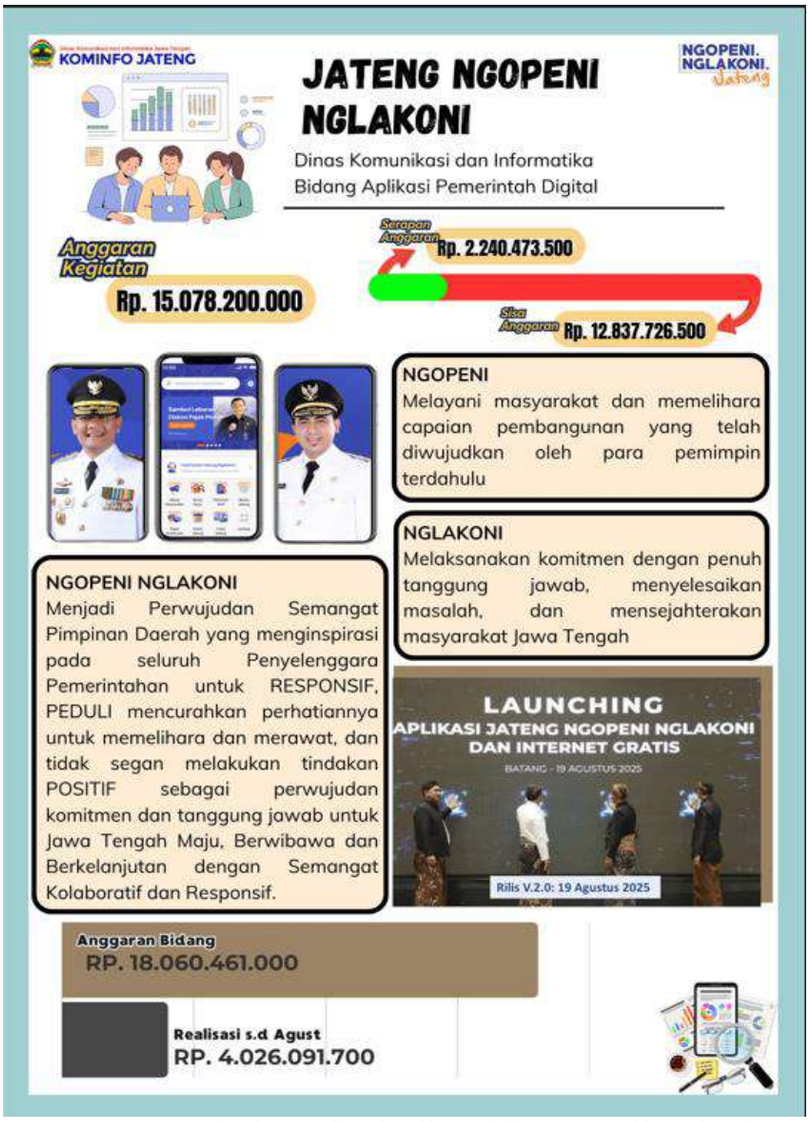

Gambar 2. 7 Capaian Bidang E-Government Diskominfo Prov. Jateng

Capaian kinerja urusan Kominfo pada Bidang E-Government dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu berupa Jateng Ngopeni Ngelakoni (JNN) yang sudah di launching pada tanggal 19 Agustus 2025.

5. **Bidang Persandian dan Keamanan Siber**

Gambar 2. 8 Capaian Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Prov. Jateng

Capaian kinerja urusan Kominfo pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu berupa Keamanan Informasi meliputi : capaian indeks KAMI Versi 5.0 sebesar 855 (Baik); Terakreditasi SNI ISO/IEC 27001: 2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Tabel 2. 7 ***Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan***

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

NO	Uraian	Pagu Indikatif Renstra Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pendapatan															
	Belanja	244.404.892	276.590.646	276.590.646	310.705.174	78.872.184.000	79.916.560.000	106.994.593.000	144.796.793.000	113.270.576	70.201.042.000	61.626.459	99.624.389	140,283,526	114,193,842,722	68.510.596.902
	Pembiayaan															

2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang diperoleh dari hasil analisis terhadap Renstra K/L, Renstra PD Kab/Kota, hasil telaah RTRW, & KLHS, guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskomdigi untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

   a. Tuntutan masyarakat dalam pelayanan yang lebih cepat, tepat, mudah dan murah.

   b. Penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah belum merata;

   c. Belum meratanya kemampuan literasi digital masyarakat;

   d. Perlunya penguatan kapasitas digital bagi para ASN;

   e. Ketersediaan layanan internet untuk pemerintahan daerah dan masyarakat belum optimal baik dari aspek kualitas jaringan maupun kecepatan internet;

   f. Pesatnya perkembangan TIK dalam era Revolusi Industri 4.0;

   g. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Jawa Tengah;

   h. Masih terbatasnya SDM aparatur yang berdaya saing digital dalam pengelolaan pemerintahan;

   i. Kualitas data sektoral sebagai dasar dalam pengambilan keputusan;

   j. Masih banyak badan publik di lingkup Provinsi Jawa Tengah yang belum terbuka;

   k. Masih tingginya ancaman keamanan siber;

   l. Perlu adanya Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

   m. Upaya Penguatan *Data Center* dalam berbagai aspek seperti sertifikasi, kualitas SDM pengelola, *power supply,* dsb sebagai aset yang memiliki tingkat *maintenance* tinggi, perlu didorong agar lebih optimal untuk masyarakat dan pemerintah.

2. Peluang

a. Kualitas pelayanan publik Jawa Tengah berbasis elektronik yang lebih baik dan dibutuhkan oleh masyarakat semakin meningkat;

b. Tuntutan jaman digital mengubah gaya hidup masyarakat berikut kesadaran tentang pentingnya data dan digitalisasi;

c. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Pemerintahan Digital Jawa Tengah;

d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan kualitas pembangunan Pemerintahan Digital Jawa Tengah;

e. Pemangku kepentingan mempunyai kesadaran mengenai pentingnya keamanan siber dalam pengelolaan teknologi informasi; Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;

f. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah berorientasi kepada layanan pemerintahan Digital karena tersedianya payung hukum yang semakin memudahkan untuk bekerjasama dalam menyongsong transformasi digital Jawa Tengah;

g. Adanya *free* program yang membekali pengguna dengan *skill* dan sertifikasi khusus seperti : *Digital Talent,* Beasiswa, *Short Course* dan platform digital lain yang berperan sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas SDM serta dapat dilaksanakan dan dikerjakan di mana saja (*by online*).

Tabel 2. 8 ***Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah***

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang teringrasi	Belum optimalnya pngelolaan TIK dan E-Goverment	1. Belum optimalnya keterhubungan antara perangkat daerah dengan jaringan intra pemerintah daerah 2. Belum optimalnya keterhubungan aplikasi SPBE dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan ketentuan regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
2.	Belum efektifnya penerapan sistem keamanan informasi	Belum optimalnya penyelenggaraa n persandian keamanan informasi	1. Belum seluruhnya perangkat daerah menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian 2. Belum optimalnya fasilitasi perangkat daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi
3.	Belum efektifnya layanan data statistik sektoral dan geospasial	Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial yang terintegrasi	1. Belum Optimalnya pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, intrepretasilitas data, kode refernsi dan / data induk 2. Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral oleh pengguna layanan data 3. Belum optimalnya penyelenggaraan/proses bisnis statistik sektoral sesuai standar

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			4. Masuk kandidat pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik
		Belum optimalnya penyelenggaraa n badan publlik yang terbuka (informatif)	1. Belum optimalnya komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan dan terdaftar di diskomdigi 2. Belum optimalnya penyelenggaraan permohonan informasi pulik yang sesuai peraturan perundangan
4.	Belum efektifnya pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik	Belum optimalnya pengedukasian masyarakat agar lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi digital	1. Masih sedikit ASN Bidang Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti bimtek / pelatihan 2. Belum optimalnya penyelenggaraan aktifitas relasi media kepada media 3. Belum optimalnya sasaran khalayak yang terpapar informasi komunikasi publik 4. Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik milik Pemda 5. Belum optimalnya pengelolaan konten informasi publik

2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel 2. 9 Perumusan Isu Strategis Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	**Permasalahan Perangkat Daerah**	**Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah**	**Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah**			**Isu Strategis Perangkat Daerah**
			Global	**Nasional**	**Regional**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis pada urusan Komdigi, statistik dan persandian	1. Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi 2. Belum efektifnya penerapan sistem keamanan informasi 3. Belum efektifnya layanan data statistik sektoral dan geospasial 4. Belum efektifnya pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik	1. Belum optimalnya tata kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi	1. Infrastruktur 2. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	1. Isu ekonomi : Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas 2. Isu tata kelola pemerintahan : memberikan pelayanan yang berkualitas		1. Pemerintahan Digital
		-				2. Perkembangan TIK
		-				3. Pengelolaan Keluahan dan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengaduan Masyarakat
		-				4. Keamanan Informasi
		-				5. Pencegahan hoaks, mis informasi dan disinformasi
		-				6. Pengelolaan Big Data

Penjelasan isu strategis:

1. Dalam rangka mewujudkan pemerintah digital untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan Pemerintah Digital Jawa Tengah, pemanfaatan indtrumen evaluasi baru SPBE dalam konteks pembinaan pemerintah digital, bukan hanya sekedar alat ukur, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran, refleksi, dan persiapan strategis bagi instansi pusat dan pemerintah daerah. Dengan indikator reformulasi Indeks Pemerintah Digital Jawa Tengah mencerminkan posisi nyata kematangan digital suatu instansi. Adapun Indeks Pemerintah Digital dihitung berdasarkan penjumlahan dari bobot pada 9 (Sembilan) aspek dan 35 (tiga puluh lima) indicator pada konsep model instrument evaluasi kinerja pemerintah digital. Indeks ini mengukur penguatan tata Kelola pemerintah digital, penguatan teknologipemerintah digital, pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, transformasi digital layanan publik prioritas, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.
2. Perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Diskomdigi) meliputi peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur digital di seluruh Jawa Tengah, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital yang kompeten, serta transformasi digital dan pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Isu-isu ini penting untuk mewujudkan transformasi digital yang merata, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan, antara lain Internet, Cloud Computing, Internet of Things (IoT), Kecerdasan Buatan (AI), Data Center, Blockcain, Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR), serta perangkat keras dan aplikasi seperti media sosial dan fintech. Teknologi ini memungkinkan akses informasi yang cepat, komunikasi global, otomatisasi tugas, analisis data besar, dan menciptakan pengalaman digital yang imersif, mengubah cara hidup dan bekerja. Sedangkan untuk pengelolaan Data Center tidak hanya sebagai tempat penyimpanan data, tetapi ke depan perlu dikembangkan lagi pemanfaatannya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
3. Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 pasal 18 menegaskan bahwa pengelola pengaduan di Daerah adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital. Dalam Permendagri dimaksud diatur pula pembagian peran, tugas dan tanggung jawab kelembagaan pengelola pengaduan. Terdapat tiga alasan penting peran pengelolaan pengaduan merupakan ruh dalam pelayanan

publik: (a).pemenuhan hak masyarakat akan pelayanan publik yang optimal. (b).pengaduan masyarakat merupakan kesempatan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan. (c). sarana atau media pemerintah dalam memberikan jawaban atas keluhan masyarakat.

4. Mengantisipasi kejadian risiko serangan keamanan informasi ke Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah, ke depan perlu ada upaya peningkatan kapasitas SDM Keamanan informasi untuk penanganan insiden dan monitoring serangan siber, yang meliputi : Application Security, Cloud Security, Cryptography, Infrastructure Security, Incident Response, dan Vulnerability Management serta tantangan menjaga privasi data pribadi baik di level individu pegawai maupun data instansi yang dikecualikan.
5. Mempertimbangan risiko operasional di lingkungan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah terutama penyebaran hoaks yang semakin massif, melalui monitoring dan counter berita hoax, dan penyusunan rekomendasi dari hasil monitoring dan analisis berita atas informasi dengan sentiment negatif, serta pelatihan monitoring dan analisis berita ke Kab/Kota di Jawa Tengah. Mengenal misinformasi dan disinformasi sangat penting untuk menjaga keamanan informasi karena membantu kita lebih waspada terhadap informasi yang salah atau menyesatkan, mencegah penyebarannya, serta melindungi data pribadi dan reputasi. Pemahaman ini juga memperkuat ketahanan digital, menjaga kepercayaan publik, dan mendorong masyarakat agar lebih kritis dan bijak dalam mengelola informasi di era digital. Terkait dengan salah satu Tusi utama Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah yaitu peliputan dan publikasi Program Pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Terkait *big data* bagi Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah mencakup infrastruktur digital yang belum merata dan biayatinggi, keterbatasan SDM yang terampil dalam analisis *big data*, isu privasi dan keamanan data seperti potensi kebocoran dan pelanggaran keamanan siber, serta tata kelola data yang perlu diperkuat melalui kolaborasi dan regulasi yang mendukung interoperabilitas data antar instansi pemerintah dan sektor swasta. Ke depan perlu adanya integrasi *Big Data* ke dalam proses pengambilan kebijakan berbasis data oleh pimpinan daerah. Hal tersebut juga mendukung implementasi Satu Data Jawa Tengah dan memerlukan dukungan kolaborasi *pentahelix* salah satunya yaitu pemanfaatan *Big Data* seperti *mobile positioning* data.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komdigi Jawa Tengah

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yang selaras dengan salah satu sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, ditetapkan sebagai tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah yang merupakan perumusan fokus program dan kegiatan strategis. Tujuan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah yaitu Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

1) **Meningkatnya Pemanfaatan Insfrastruktur TIK;**
2) **Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan sistematis.**

Berdasarkan tabel penjabaran 136 Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dinas Komdigi Mendukung Indeks Reformasi Birokrasi dengan aktivitas riil perangkat daerah :

1. Pengembangan aplikasi layanan terintegrasi
   Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Pengelolaan Aplikasi Informatika ;
2. Penyusunan kebijakan atau regulasi berupa peraturan gubernur tentang integrasi aplikasi di Jawa Tengah ke dalam aplikasi "Jateng Ngopeni". Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Pelaksanaan integrasi aplikasi yang dimulai dari pemetaan aplikasi, pembelian lisensi, metode, arsitektur layanan, tenaga ahli/tim ahli, help desk, rapat koordinasi. Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;

4. Pemetaan dan penguatan infrastruktur PPID pusat (dinas komdigi) Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
5. Pemetaan dan penguatan SDM PPID pusat (dinas komdigi) Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
6. Pelatihan SDM PPID untuk seluruh perangkat daerah Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
7. Penyusunan Pergub satuan tugas pengamanan data digital
8. Implementasi Pencegahan dan Pengamanan Informasi dari ancaman insiden siber oleh Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) di Pemprov Jateng Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Penyelenggaraan Persandian untuk Kemananan Informasi;
9. Memberikan fasilitasi pencegahan dan keamanan informasi kepada Kabupaten/Kota di Jateng Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Penyelenggaraan Persandian untuk Kemananan Informasi;
10. Penyelenggaraan Forum Media dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Forum Media dan Komunikasi Publik;

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi, dengan aktivitas riil perangkat daerah :

1. Penyediaan jaringan internet di desa, Pemasangan jaringan FO, Wi-fi gratis berkapasitas 20 Mbps, bersifat stimulan selama 1 tahun anggaran dan, pelatihan penggunaan secara positif (usaha/bisnis). Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam program aplikasi informatika Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dengan rincian 2 tujuan dan 10 indikator sasaran strategis Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2.

.

Tabel 3. 1 ***Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah***

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Angka	3,07	4,50	-	-	-	-	-	-	-
			Indeks Pemerintahan Digital	Angka	-	2	2,1	2,3	2.3	2.7	3	3,1	3,1
		Meningkatkanya Pemanfaatan Insfrastruktur TIK	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital	Angka	-	-	3,95	4,03	4,08	4,15	4,23	4,27	4,27
		Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data terstruktur dan sistematis	Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Angka	-	-	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3

Tabel 3. 2 ***Tujuan, Sasaran serta Indikator yang Berkaitan Dengan Kesekretariatan***

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat Daerah Berintregritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	69,02	69,2	69,23	69,25	69,5	70	70,01	70,02	70,02
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah.	Indeks Manajeme n Resiko Perangkat Daerah	Angka	2,738	3,01	3,02	2,8	2,9	3	3,01	3,02	3,02
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	78	79	79,5	80	80,05	81	81,5	82	82

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional, dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan perangkat daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik atau fokus, konkrit dan operasional. Strategi dan kebijakan Diskomdigi yang disusun merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Diskomdigi dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 ***Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan***

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan	1. Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi TIK.	1. Melakukan penguatan pengelolaan layanan dan tata kelola infrastruktur TIK. 2. Mengoptimalkan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi. 3. Meningkatkan aplikasi berbagi pakai dan proses bisnis pemerintahan. 4. Mengimplemen tasikan inisiasi Smart Province.	1. Meningkatkan Ketersediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Meningkatkan SDM Pengelola Layanan Infrastruktur TIK 3. Meningkatkan Aplikasi berbagi pakai dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan atau Dikelola 4. Mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas 5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran keamanan informasi kepada seluruh pihak 6. Mengimplementasikan keamanan informasi secara konsisten di seluruh unit kerja di Pem. Prov Jateng 7. Mengurangi resiko keamanan informasi

			melalui penerapan pedoman teknis yang lebih baik
	2. Meningkatnya pelayanan tata kelola data terstruktur dan sistematis	1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral Jawa Tengah 2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan layanan data statistik dan data geospasial 3. Meningkatkan ketercapaian penyelenggaraan Big Data 4. Meningkatkan tata kelola dan layanan keamanan informasi serta jaring komunikasi sandi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Digital. 5. Mengoptimalkan pengelolaan informasi publik. 6. Meningkatkan kualitas konten informasi publik.	1. Meningkatkan Kualitas Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi 2. Meningkatkan kualitas SDM pengelola data Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi 3. Meningkatkan Nilai Keterbukaan Informasi Publik 4. Meningkatkan Jumlah Badan Publik yang Terbuka (Informatif) 5. Meningkatkan Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik 6. Meningkatkan kualitas konten informasi publik yang disebarluaskan baik melalui media internal maupun eksternal
2.Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di dinas komunikasi dan informasi digital	1. meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital.	1. meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan.	1. Meningkatkan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berbasis Risiko 2. Meningkatkan kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2. Meningkatnya Kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital.	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Digital.	1. Meningkatkan pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan. 2. Meningkatkan pemenuhan layanan

			administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan 3. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah 4. Meningkatkan kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tabel 3. 4 ***Pentahapan Renstra Perangkat Daerah***

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengetahuan dasar dan kapasitas pembangunan DIgital	Peningkatan akses dan Kualitas layanan publik	Akselerasi pembangunan digital prioritas	Pembangunan digital terintegrasi dan berkelanjutan	Penyelesaian dan konsolidasi kesinambungan pembangunan digital

Penjelasan Terkait penekanan pembangunan pada setiap tahapan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan Digital

   Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non-fisik menjadi dua hal yang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, pembangunan dapat

dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi "Jawa Tengah sebagai Provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045".

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik

   Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan. Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada menciptakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan publik ini tidak dimaknai sempit terbatas pada aspek jangkauan layanan secara geografis, tetapi lebih pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat Provinsi Jawa Tengah akan semakin mudah mengakses layanan publik yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya, mencakup layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial lainnya, sehingga sistem layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan merata.

3. Akselerasi Pembangunan Digital Prioritas

   Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung tercapianya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah di akhir tahun perencanaan. Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan. Sebagai periode tengah waktu, tahap ini menjadi tahap krusial karena sudah terlihat proyeksi keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan

berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Pelaksanaan serta capaian pembangunan yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan sesuai target yang telah ditetapkan akan terus dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian yang lebih mendalam. Namun, terhadap pelaksanaan maupun capaian pembangunan yang teridentifikasi berjalan lambat atau tidak sesuai target, dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target pembangunan tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan. Upaya akselerasi ini sekaligus merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko tidak tercapainya target pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan visi " Jawa Tengah sebagai Provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia emas 2045".

4. Pembangunan Digital Terintegrasi dan Berkelanjutan

   Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Integrasi ini juga mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tahap keempat ini sekaligus menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata, serta dapat diteruskan melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan, yang mendukung keberhasilan pembangunan keseluruhan.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesinambungan Pembangunan Digital

   Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target tujuan dan sasaran Dinas Komunkasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah tercapai sebagai indikator keberhasilan guna mendukuung terwujudnya visi " Jawa Tengah sebagai Provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia emas 2045". Tahap ini juga menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034), yang menekankan pada tema "Akselerasi Pembangunan" guna mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kesinambungan pembangunan. Artinya, pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dipandang sebagai pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap mendasarkan pada pelaksanaan maupun capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah menuju "Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045". Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029, Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periodeperiode selanjutnya. Pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3. 5 Manajemen Risiko Strategis Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan *	Indeks Pemerintah Digital	Rendahnya tingkat kematangan indeks Pemdi	20	-Keterlambatan pemenuhan dokomen Pemdi - Ketidak singkronan dengan SPBE yang sedang berjalan - lemahnya kolaborasi dengan listas OPD - terbatasnya SDM - rendahnya partisipasi pulik - rendahnya keamanan informasi dan privasi - data tidak tersandar	Skor nllai pemdi turun	Menyusun, melaksanakan dan monitoring evaluasi arsitertur dan peta rencana Pemerintah Digital	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Sasaran								
Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK **	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital	Transformasi digital gagal dilakukan	16	-Integrasi yang rumit dikarenakan tidak ada standar yang seragam dapat menyebabkan setiap lembaga pemerintahan membangun sistemnya sendiri, sehingga mempersulit integrasi data dan layanan antar-instansi -Keamanan data yang rentan	-Pengambilan keputusan yang tidak akurat -Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola layanan publik	Mensinergikan pemanfaatan infrastruktur TIK dengan pada stakeholder, baik dari OPD maupun pemerintah Kabupaten/Kota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan Sistematis **	Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Menurunnya nilai keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah	16	Masih adanya ego sektoral dalam pemenuhan instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Menurunnya kategori keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah	Meningkatkan implementasi regulasi tata kelola data	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Tujuan								
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital *	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Rendahnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis	16	Standar pelayanan tidak dilaksanakan dengan optimal	Penurunan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi atas implementasi RB untuk dilaksanakan oleh semua unit kerja	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Sasaran								
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **	Indeks Kepuasan Masyarkat Perangkat Daerah	Keterlambatan Respon dan Tanggapan terhadap permintaan Pelayanan Publik	12	-SOP tidak dijalankan dengan baik '-Kurangnya sosialisasi layanan Diskomidigi	Waktu pelayanan menjadi lebih lama	menyusun dan berkomitmrn terhadap pelaksanan standar Operasi Prosedut (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **	Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah tidak berkualitas dan hanya sebatas pemenuhan dokumen	12	Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam menerapkan pengelolaan risiko	Perencanaan Kegiatan Perangkat daerah kurang baikkarena tidak menerapkan pengelolaan risiko	Melaksanakan FGD dan brainstroming saat penyusunan Risk Register	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jawa Tengah 2025-2029 melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rangka mencapai 2 tujuan dan 4 indikator strategis Perangkat Daerah, Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 4 (empat) urusan, 5 (lima) program, 16 kegiatan dan 81 sub kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Dinas Komunikasi Informatika dan digital Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas dan fungsi urusan Pemerintahan Bidang Kominfo,Statistik dan Persandian. Diskomdigi melaksanakan 4 urusan dan 5 Program :

1. Urusan Kominfo – Program Pengelolaan aplikasi informatika, Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
2. Urusan Statistik – Program penyelenggaraan Statistik Sektoral
3. Urusan Persandian – Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
4. Urusan penunjang – Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

Pada Urusan Kominfo, Diskomdigi melaksanakan 16 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan :

1. Pada Urusan Kominfo mencakup beberapa Kegiatan dan sub kegiatan :
   a. Kegiatan Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah provinsi, mencakup sub kegiatan : keterhubungan jaringan intra pemerintah daerah Kab/kota ke jaringan intra pemerintah daerah Provinsi; penyediaan akses internet; penyelenggaraan jaringan intra

pemerintah daerah provinsi; koordinasi pembangunan dan atau pengembamgan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE; koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE; koordinasi dan fasilitasi penyelengaraan provinsi cerdas; penyelengaraan pusat kendali pemerintah daerah;

b. Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, mencakup sub kegiatan: Relasi media; pengelolaan media komunikasi publik; penguatan kapasitas SDM komunikasi publik; kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat; dukungan administratif, keuangan dan tatakelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik; pelayanan informasi publik; penyusunan strategi komunikasi publik; monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik

2. Pada urusan Persandian mencakup beberapa kegiatan dan sub kegiatan :
   a. Kegiatan Penyelengaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, mencakup Sub Kegiatan: Penetapan kebijakan tatakelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah; pengelolaan sumber daya keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan analisis kebutuhan; penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah; pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik.
   b. Kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi, mencakup sub kegiatan : Operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah.
3. Pada Urusan Statistik mencakup 1 Kegiatan dan beberapa sub kegiatan:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup daerah provinsi, mencakup sub kegiatan: pemenuhan prinsip SDI; peningkatan kualitas statistik sektoral; pelaksanaan probis statistik sektoral sesuai standar.
4. Pada Urusan Penunjang mencakup beberapa kegiatan dan sub kegiatan :
   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mencakup Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN; penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; koordinasi dan pelaksanaan

akuntansi SKPD; pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, mencakup Sub Kegiatan : penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daearah SKPD; pengamanan barang milik daerah SKPD; rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD; Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, mencakup Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya; Pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian; koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian; Monitoring , evaluasi , dan peneliaian kinerja pegawai; pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; bimbingan teknis omplementasi peraturan perundang undangan.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, mencakup Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik atau/ penerangan bangunan kantor ; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan peralatan rumah tangga; penyediaan bahan logistic kantor; penyediaan barang cetakan dan pengandaan; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan; fasilitasi kunjungan tamu; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD; dan dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, mencakup Sub Kegiatan : meliputi pengaddan kendaraan dinas operasional atau lapangan; pengadaan mebel; pengadaan asset tak berwujud; pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya; pengadaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya; pengadaan sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mencakup sub kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa pelayanan umum kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mencakup sub kegiatan: penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan perijinan alat besar; pemeliharaan mebel; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; pemeliharaan aset tak berwujud; pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya; pemeliharaan atau rehabilitasi sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya; pemeliharaan atau rehabilitasi sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
h. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, mencakup sub kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; evaluasi kinerja perangkat daerah; pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah; penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4. 1 ***Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah***

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan *										20.655.954.704		20.814.304.436		19.319.020.900		18.886.533.412		24.593.906.281	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
						Indeks Pemerintahan Digital *	Angka	N/A	2,1		2,3		2,7		3		3,1		Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur									12.230.029.954		12.348.621.436		10.808.181.900		10.162.859.660		14.851.791.436	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK **																			
						Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital **	Angka	N/A	4,03	12.230.029.954	4,08	12.348.621.436	4,15	10.808.181.900	4,23	10.162.859.660	4,24	14.851.791.436	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA ***							4.492.547.558		4.537.472.000		4.583.747.422		4.811.988.000		5.922.588.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Infrastruktur Teknologi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya layanan infrastruktur TIK				Tingkat Pemenuhan Layanan Digital ***	%	N/A	25	4.492.547.558	40	4.537.472.000	60	4.583.747.422	80	4.811.988.000	100	5.922.588.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Infrastruktur Teknologi Digital	
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ****						4.492.547.558		4.537.472.000		4.583.747.422		4.811.988.000		5.922.588.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Infrastruktur Teknologi Digital	
		Meningkatnya integrasi jaringan				Jumlah Kabupaten/Kota yang	Kabupaten/Kota	N/A	35	947.153.558	35	956.625.000	35	966.191.000	35	1.014.500.000	35	1.248.646.000	Kelompok Kerja Pengelola	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		intra pemerintah daerah				memanfaatkan layanan jaringan Pemerintah Daerah Provinsi ****													an Infrastruktur Digital	
					Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah					947.153.558		956.625.000		966.191.000		1.014.500.000		1.248.646.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Infrastruktur Teknologi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Provinsi *****															
		Terlaksanany a Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi *****	Kabupaten/Kota	N/A	35	947.153.558	35	956.625.000	35	966.191.000	35	1.014.500.000	35	1.248.646.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Infrastruktur Digital	JAWA TENGAH
		Terpenuhinya layanan				Jumlah perangkat daerah	Unit	N/A	250	2.740	500	2.767	750	2.795	750	2.934	750	3.612	Kelompok Kerja	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		internet bagi Perangkat daerah				yang layanan internetnya terpenuhi ****				.000.000		.400.000		.974.000		.827.000		.180.000	Strategi dan akselerasi Infrastruktur Digital	
					Penyediaan Akses Internet *****					2.740.000.000		2.767.400.000		2.795.974.000		2.934.827.000		3.612.180.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Infrastruktur Teknologi Digital	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah				Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses	Perangkat Daerah	86	100	2.740.000.000	116	2.767.400.000	132	2.795.974.000	148	2.934.827.000	164	3.612.180.000	Kelompok Kerja Strategi dan akselerasi Infrastruktur Digital	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		dan UPTD dalam rangka penyelenggaraan SPBE				internet yang disediakan oleh Dinas *****														
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang kondisi perangkat dan jaringannya terpetakan				Jumlah perangkat daerah yang terpetakan kondisi perangkat dan jaringannya ****	Unit	N/A	250	805.394.000	500	813.447.000	750	821.582.422	750	862.661.000	750	1.061.762.000	Kelompok Kerja Layanan infrastruktur digital	
					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah					805.394.000		813.447.000		821.582.422		862.661.000		1.061.762.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Daerah Provinsi *****														Infrastruktur Teknologi Digital	
		Terlaksanaanya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi *****	Perangkat Daerah	98	107	805.394.000	109	813.447.000	111	821.582.422	113	862.661.000	115	1.061.762.000	Kelompok Kerja Layanan infrastruktur digital	JAWA TENGAH
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI							2.532.531.960		2.557.857.000		2.583.436.000		2.712.608.000		3.338.673.000	Dinas Komunikasi dan Informasi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			INFORMATIKA ***																Digital - Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	
		Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Pemerintahan Digital				Tingkat Pembangunan/Pengembangan Aplikasi ***	%	N/A	12	2.532.531.960	22	2.557.857.000	35	2.583.436.000	47	2.712.608.000	59	3.338.673.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ****						2.532.531.960		2.557.857.000		2.583.436.000		2.712.608.000		3.338.673.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya aplikasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi				Jumlah aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi ****	Aplikasi	N/A	10	2.232.531.960	10	2.254.857.000	10	2.277.406.000	10	2.391.276.000	10	2.943.179.000	Pokja Pengembangan Pemerintah Digital	
					Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana					2.232.531.960		2.254.857.000		2.277.406.000		2.391.276.000		2.943.179.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE *****															
		Meningkatnya jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentua				Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi	Aplikasi	N/A	5	2.232.531.960	5	2.254.857.000	5	2.277.406.000	5	2.391.276.000	5	2.943.179.000	Pokja Pengembangan Pemerintah Digital	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerintah Digital

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		n atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE *****														
		Meningkatnya rekomendasi pengembangan aplikasi sesuai dengan Arsitektur SPBE				Jumlah rekomendasi pengembangan aplikasi sesuai Arsitektur SPBE ****	Rekomendasi	N/A	5	150.000.000	10	151.500.000	10	153.015.000	10	160.666.000	10	197.747.000	Pokja Tata Kelola Pemerintah Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE *****					150.000.000		151.500.000		153.015.000		160.666.000		197.747.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	
		Tersusunnya Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE				Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaboras	Laporan	N/A	3	150.000.000	4	151.500.000	4	153.015.000	4	160.666.000	4	197.747.000	Pokja Tata Kelola Pemerintah Digital	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerintah Digital

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE				i penyelenggaraan SPBE *****														
		Meningkatnya entitas yang mendapatkan pemahaman tentang Provinsi Cerdas				Jumlah entitas yang mendapatkan pemahaman tentang Provinsi Cerdas ****	Orang	N/A	10	150.000.000	10	151.500.000	10	153.015.000	10	160.666.000	10	197.747.000	Pokja Ekosistem Pemerintah Digital	
					Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi					150.000.000		151.500.000		153.015.000		160.666.000		197.747.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Cerdas *****														Pemerintah Digital	
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas				Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas *****	Laporan	N/A	4	150.000.000	4	151.500.000	4	153.015.000	4	160.666.000	4	197.747.000	Pokja Ekosistem Pemerintah Digital	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerintah Digital
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA ***							3.680.196.000		3.680.196.000		2.030.476.042		954.184.224		3.680.196.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya Pemanfaatan Pusat Data Provinsi				Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi ***	%	N/A	65	3.680.196.000	68	3.680.196.000	70	2.030.476.042	72	954.184.224	75	3.680.196.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ****						3.680.196.000		3.680.196.000		2.030.476.042		954.184.224		3.680.196.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Terimplementasikannya operasi government cloud				Persentase penyimpanan yang termanfa	%	N/A	70	3.680.196.000	72	3.680.196.000	74	2.030.476.042	76	954.184.224	78	3.680.196.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		computing				atkan ****													Pusat Data	
					Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah *****					3.680.196.000		3.680.196.000		2.030.476.042		954.184.224		3.680.196.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah				Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali *****	Laporan	N/A	1	3.680.196.000	1	3.680.196.000	1	2.030.476.042	1	954.184.224	1	3.680.196.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMA							1.524.754.436		1.573.096.436		1.610.522.436		1.684.079.436		1.910.334.436	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			NAN INFORMASI ***																Persandian dan Keamanan Siber	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi				Tingkat Kematangan Keamanan Siber ***	Angka	N/A	3,59	1.524.754.436	3,6	1.573.096.436	3,61	1.610.522.436	3,62	1.684.079.436	3,63	1.910.334.436	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber	
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah						889.334.436		931.322.436		962.331.436		1.003.478.436		1.072.652.436	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Provinsi ****																
		Meningkatnya pemahaman perangkat daerah terkait implementasi kebijakan keamanan informasi dan persandian				Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan wawasan terkait implementasi kebijakan keamanan informasi dan persandian ****	Unit	20	50	100.660.436	50	100.660.436	50	100.660.436	50	100.660.436	50	100.660.436	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	
					Penetapan Kebijakan Tata					100.660.436		100.660.436		100.660.436		100.660.436		100.660.436	Dinas Komunikasi dan Informasi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah *****														Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerint				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100.660.436	1	100.660.436	1	100.660.436	1	100.660.436	1	100.660.436	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		ah Daerah				yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelen														

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						ggaraan persandian. *****														
		Meningkatnya Kapasitas SDM Persandian dan Keamanan Informasi				Jumlah SDM persandian dan keamanan informasi yang ditingkatkan kapasitasnya ****	Orang	2	3	52.080.000	4	52.600.000	4	52.126.000	4	55.783.000	5	68.657.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan *****					52.080.000		52.600.000		52.126.000		55.783.000		68.657.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber	
		Terlaksanaanya Pengelolaan Sumber Daya				Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya	Laporan	1	4	52.080.000	4	52.600.000	4	52.126.000	4	55.783.000	4	68.657.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan *****													Siber dan Sandi	
		Terselenggaranya layanan keamanan informasi dan persandian di				Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan keamanan	%	100	100	589.754.000	100	629.754.000	100	659.754.000	100	689.754.000	100	709.754.000	Kelompok Kerja Layanan Keamanan Informasi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		perangkat daerah				informasi dan persandian ****														
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah *****					589.754.000		629.754.000		659.754.000		689.754.000		709.754.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber	
		Tersediannya Layanan Keamanan Informasi dan				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan	Perangkat Daerah	20	50	589.754.000	50	629.754.000	50	659.754.000	50	689.754.000	50	709.754.000	Kelompok Kerja Layanan Keamanan Informasi	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Persandian Pemerintah Daerah				Layanan Keamanan Informasi dan Persandian *****														
		Meningkatnya perangkat daerah yang mendukung pemanfaatan teknologi kemanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan				Jumlah perangkat daerah yang mendukung pemanfaatan teknologi keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan	Unit	20	50	146.840.000	50	148.308.000	50	149.791.000	50	157.281.000	50	193.581.000	Kelompok Kerja Layanan Keamanan Informasi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		nonelektronik				nonelektronik ****														
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik *****						146.840.000		148.308.000		149.791.000		157.281.000		193.581.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerint				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan	Laporan	50	50	146.840.000	50	148.308.000	50	149.791.000	50	157.281.000	50	193.581.000	Kelompok Kerja Layanan Keamana	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		ahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik *****													n Informasi	
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi ****						635.420.000		641.774.000		648.191.000		680.601.000		837.682.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah Provinsi				Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Jaring Komunikasi Sandi ****	Unit	50	50	635.420.000	50	641.774.000	50	648.191.000	50	680.601.000	50	837.682.000	Kelompok Kerja Pengamanan Sistem Komunikasi Ruang Digital	
					Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah					635.420.000		641.774.000		648.191.000		680.601.000		837.682.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Daerah *****															
		Terlaksanany a Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi	Perangkat Daerah	50	50	635.420.000	50	641.774.000	50	648.191.000	50	680.601.000	50	837.682.000	Kelompok Kerja Pengamanan Sistem Komunikasi Ruang Digital	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						pemerintah Daerah. *****														
	Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan Sistematis **									8.425.924.750		8.465.683.000		8.510.839.000		8.723.673.752		9.742.114.845	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
						Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi **	Angka	N/A	2,6	8.425.924.750	2,7	8.465.683.000	2,8	8.510.839.000	2,9	8.723.673.752	3	9.742.114.845	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK ***							7.894.813.780		7.929.261.000		7.969.054.000		8.154.801.752		9.041.945.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media	
		Meningkatnya Kualitas Informasi Publik				Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik ***	Angka	85	85	7.894.813.780	86	7.929.261.000	87	7.969.054.000	88	8.154.801.752	89	9.041.945.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media	
				Pengelolaan Informasi dan						7.894.813.780		7.929.261.000		7.969.054.000		8.154.801.752		9.041.945.000	Dinas Komunikasi dan Informasi	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi ****															Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media	
		Meningkatnya Konten Informasi Publik yang disebarluaskan				Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan ****	Konten	170	190	1.300.000.000	200	1.313.000.000	210	1.326.130.000	220	1.392.433.000	230	1.713.807.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik dan Relasi Media	
					Relasi Media *****					600.000.000		606.000.000		612.060.000		642.663.000		790.988.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Komunika	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																			si Publik dan Media	
		Terlaksanya Relasi Media				Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam	Laporan	10	4	600.000.000	6	606.000.000	8	612.060.000	10	642.663.000	12	790.988.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik dan Relasi Media	Bidang Komunikasi Publik dan Media

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						kegiatan relasi media *****														
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik *****					700.000.000		707.000.000		714.070.000		749.770.000		922.819.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media	
		Terlaksanaanya Pengelolaan Media Komunikasi Publik				Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah	Media	20	4	700.000.000	6	707.000.000	8	714.070.000	10	749.770.000	12	922.819.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik	Bidang Komunikasi Publik dan Media

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis *****													dan Relasi Media	
		Meningkatnya Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi				Persentase Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi ****	%	60	40	4.644.813.780	50	4.646.761.000	60	4.648.729.000	68	4.658.666.000	70	4.706.825.000	Kelompok Kerja Analisisi Isu, Kemitraan dan Kehumasan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik *****					194.813.780		196.761.000		198.729.000		208.666.000		256.825.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan *****	Orang	20	20	194.813.780	25	196.761.000	30	198.729.000	35	208.666.000	35	256.825.000	Kelompok Kerja Analisisi Isu, Kemitraan dan Kehumasan	Bidang Komunikasi Publik dan Media
					Kemitraan Komunika					4.450		4.450		4.450		4.450		4.450	Dinas Komunikasi dan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					si dengan Komunitas Informasi Masyarakat *****					.000.000		.000.000		.000.000		.000.000		.000.000	Informasi Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media	
		Terlaksanaanya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo *****	Komunitas	40	20	4.450.000.000	25	4.450.000.000	30	4.450.000.000	33	4.450.000.000	35	4.450.000.000	Kelompok Kerja Analisisi Isu, Kemitraan dan Kehumasan	Bidang Komunikasi Publik dan Media
		Meningkatnya Layanan Permoho				Persentase Layanan Permohonan	%	82	84	650.000.000	85	656.500.000	86	668.065.000	87	711.267.752	88	907.506.000	Kelompok Kerja Pengelola	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		nan Informasi yang Diselesaikan				Informasi yang Diselesaikan ****													an Informasi dan Dokumentasi	
					Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *****					150.000.000		151.500.000		153.015.000		160.665.752		197.747.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksanany a Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika *****	Laporan	50	55	150.000.000	57	151.500.000	59	153.015.000	61	160.665.752	63	197.747.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Bidang Komunikasi Publik dan Media

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Pelayanan Informasi Publik *****					500.000.000		505.000.000		515.050.000		550.602.000		709.759.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan *****	Permohonan	70	76	500.000.000	77	505.000.000	78	515.050.000	79	550.602.000	80	709.759.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Bidang Komunikasi Publik dan Media

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersusunnya Rekomendasi terhadap isu publik sebagai strategi komunikasi dalam agenda prioritas pemerintah daerah				Jumlah Rekomendasi isu publik yang disusun ****	Rekomendasi	90	135	1.300.000.000	140	1.313.000.000	145	1.326.130.000	150	1.392.435.000	155	1.713.807.000	Kelompok Kerja Analisisi Isu, Kemitraan dan Kehumasan	
					Penyusunan Strategi Komunikasi Publik *****					530.000.000		535.300.000		540.653.000		567.685.000		698.706.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksanya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun *****	Dokumen	3	1	530.000.000	1	535.300.000	1	540.653.000	1	567.685.000	1	698.706.000	Kelompok Kerja Analisisi Isu, Kemitraan dan Kehumasan	Bidang Komunikasi Publik dan Media
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik *****					770.000.000		777.700.000		785.477.000		824.750.000		1.015.101.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media	
		Terlaksanya Monitoring Informasi				Jumlah rekomendasi komunikasi	Rekomendasi	90	135	770.000.000	140	777.700.000	145	785.477.000	150	824.750.000	155	1.015.101.000	Kelompok Kerja Analisisi Isu,	Bidang Komunikasi Publik dan Media

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah *****													Kemitraan dan Kehumasan	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL ***							531.110.970		536.422.000		541.785.000		568.872.000		700.169.845	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kematangan SDI tingkat provinsi				Indeks Satu Data Indonesia ***	Indeks	N/A	86	531.110.970	87	536.422.000	88	541.785.000	89	568.872.000	90	700.169.845	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi ****						531.110.970		536.422.000		541.785.000		568.872.000		700.169.845	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	
		Tersediannya data prioritas yang				Persentase Data Prioritas yang	%	25	30	200.000.000	40	202.000.000	50	204.020.000	60	214.220.000	70	263.662.845	Kelompok Kerja Pengelola	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		dapat diakses oleh publik				dapat diakses publik ****													an Integrasi Data	
					Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia *****					200.000.000		202.000.000		204.020.000		214.220.000		263.662.845	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia				Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data,	%	20	40	200.000.000	60	202.000.000	80	204.020.000	100	214.220.000	100	263.662.845	Kelompok Kerja Pengelolaan Integrasi Data	Bidang Pengelolaan Data dan Statistik

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk *****														
		Tersediannya data Geospasial yang dapat diakses oleh publik				Jumlah data geospasial yang dipublikasikan ****	Data	N/A	30	131.110.970	40	132.422.000	50	133.745.000	60	140.432.000	70	172.845.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Data Geospasial	
					Peningkatan kualitas statistik					131.110.970		132.422.000		133.745.000		140.432.000		172.845.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital -	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					sektoral *****														Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	
		Meningkatnya kualitas statistik sektoral				Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. *****	%	20	40	131.110.970	60	132.422.000	80	133.745.000	100	140.432.000	100	172.845.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Data Geospasial	Bidang Pengelolaan Data dan Statistik
		Meningkatnya kualitas data sektoral				Jumlah perangkat daerah yang memiliki data	Unit	10	10	200.000.000	14	202.000.000	18	204.020.000	22	214.220.000	25	263.662.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Data Statistik	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		perangkat daerah				sektoral sesuai prinsip SDI ****														
					Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar *****					200.000.000		202.000.000		204.020.000		214.220.000		263.662.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	
		Terlaksanaanya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan	%	20	40	200.000.000	60	202.000.000	80	204.020.000	100	214.220.000	100	263.662.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Data Statistik	Bidang Pengelolaan Data dan Statistik

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						statistik sektoral *****														
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Komunikasi dan Informasi										30.982.544.296		31.340.579.564		33.357.412.100		36.423.721.588		43.481.861.719	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Digital *																				
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital *	Angka	69,02	69,23		69,25		69,5		70		70,02		Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Komuni									30.582.544.296		30.936.579.564		32.938.412.100		35.989.721.588		42.964.861.719	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	kasi dan Informasi Digital **																			
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **	Angka	78	79,5	30.582.544.296	80	30.936.579.564	80,5	32.938.412.100	81	35.989.721.588	81,5	42.964.861.719	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							30.027.033.319		29.866.579.564		31.853.412.100		34.904.721.588		41.869.861.719	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital				Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital ***	%	78	79,5	30.027.033.319	80	29.866.579.564	80,5	31.853.412.100	81	34.904.721.588	81,5	41.869.861.719	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						20.412.000.000		20.412.603.486		20.413.206.000		20.416.266.300		20.431.098.854	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Meningkatnya layanan				Jumlah jenis laporan	Dokumen	100	7	20.41	7	20.41	7	20.41	7	20.41	7	20.43	SUB BAGIAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		administrasi keuangan perangkat daerah				administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****				2.000.000		2.603.486		3.206.000		6.266.300		1.098.854	KEUANGAN	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	107	115	20.000.000.000	113	20.000.000.000	111	20.000.000.000	109	20.000.000.000	107	20.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
					Penyediaan					352.0		352.0		352.0		352.0		352.0	Dinas Komunika	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****					00.000		00.000		00.000		00.000		00.000	si dan Informasi Digital	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	352.000.000	12	352.000.000	12	352.000.000	12	352.000.000	12	352.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD *****					20.000.000		20.201.162		20.402.000		21.422.100		26.366.285	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksanany a Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD *****	Dokumen	4	4	20.000.000	4	20.201.162	4	20.402.000	4	21.422.100	4	26.366.285	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan *****					21.000.000		21.211.220		21.422.100		22.493.205		27.684.599	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Tersediany a Dokumen Bahan Tanggapa				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	Dokumen	1	1	21.000.000	1	21.211.220	1	21.422.100	1	22.493.205	1	27.684.599	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		n Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan *****														
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****						19.000.000		19.191.104		19.381.900		20.350.995		25.047.970	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	4	4	19.000.000	4	19.191.104	4	19.381.900	4	20.350.995	4	25.047.970	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
				Administrasi Barang Milik						218.5		218.7		239.1		270.0		299.4	Dinas Komunikasi dan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Daerah pada Perangkat Daerah ****						00.000		00.000		00.000		80.000		00.000	Informasi Digital	
		Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	6	6	218.500.000	6	218.700.000	6	239.100.000	6	270.080.000	6	299.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					9.000.000		9.100.000		9.500.000		10.000.000		12.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					SKPD *****															
		Tersediannya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	9.000.000	1	9.100.000	1	9.500.000	1	10.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****					200.000.000		200.000.000		220.000.000		250.000.000		275.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksanannya Pengamanan Barang Milik				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Daerah SKPD				Daerah SKPD *****														
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD *****					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.250.000		6.500.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksanya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.250.000	1	6.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		pada SKPD				pada SKPD *****														
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****					4.500.000		4.600.000		4.600.000		4.830.000		5.900.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksanaanya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	4	4	4.500.000	4	4.600.000	4	4.600.000	4	4.830.000	4	5.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
				Administrasi Kepegaw						93.000.000		118.0		99.700.000		104.2		153.0	Dinas Komunikasi dan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				aian Perangkat Daerah ****								00.000				50.000		00.000	Informasi Digital	
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	20	93.000.000	40	118.000.000	60	99.700.000	80	104.250.000	100	153.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka					0		20.000.000		0		0		20.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					pannya *****															
		Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	1	0	N/A	20.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****					13.000.000		13.000.000		13.200.000		14.000.000		17.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksananya Pendataan dan				Jumlah Dokumen Pendataan dan	Dokumen	2	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.200.000	2	14.000.000	2	17.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN	KOTA SEMARANG OPD

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****													KEPEGAWAIAN	Provinsi SEMARANG WONOSOBO
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian *****					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.500.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi	Dokumen	N/A	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	6.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Koordinasi ke Kementerian/Lembaga, DKI JAKARTA KOTA SEMARANG OP

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Kepegawaian				Kepegawaian *****														D Provinsi Tugas Belajar Pegawai, United States of America
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****					20.000.000		25.000.000		25.500.000		26.500.000		33.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksanany a Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Dokumen	2	2	20.000.000	2	25.000.000	2	25.500.000	2	26.500.000	2	33.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi SEMARANG<br

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Kinerja Pegawai				Pegawai *****														>WONOSOBO
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****					50.000.000		50.000.000		51.000.000		53.500.000		70.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	51.000.000	10	53.500.000	10	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Diklat Umum, Struktural dan Teknis, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OPD Provinsi<

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																				br>SEMARANG Untuk Ujikom dan Diklat JF, DKI JAKARTA
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.250.000		6.500.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Orang	N/A	N/A	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.250.000	50	6.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		g-Undangan				Peraturan Perundang-Undangan *****														
				Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						476.800.000		481.595.799		486.383.680		510.702.868		628.572.224	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	30	476.800.000	60	481.595.799	70	486.383.680	90	510.702.868	100	628.572.224	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
					Penyediaan Kompone					28.300.000		28.584.644		28.868.830		30.312.272		37.308.293	Dinas Komunikasi dan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					n Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****														Informasi Digital	
		Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	28.300.000	2	28.584.644	2	28.868.830	2	30.312.272	2	37.308.293	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan					90.200.000		91.107.240		92.013.020		96.613.672		118.911.943	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Kantor *****															
		Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	10	20	90.200.000	22	91.107.240	24	92.013.020	28	96.613.672	30	118.911.943	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi SEMARANG
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					25.000.000		25.251.452		25.502.500		26.777.625		32.957.856	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Tersediannya Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	2	2	25.000.000	2	25.251.452	2	25.502.500	2	26.777.625	2	32.957.856	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Disediakan *****														
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					30.000.000		30.301.743		30.603.000		32.133.150		39.549.427	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Tersediannya Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	6	6	30.000.000	6	30.301.743	6	30.603.000	6	32.133.150	6	39.549.427	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****					28.000.000		28.281.627		28.562.800		29.990.940		36.912.798	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersediaan ya Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	4	4	28.000.000	4	28.281.627	4	28.562.800	4	29.990.940	4	36.912.798	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****					300.000		303.017		306.030		321.332		395.494	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Tersediaan ya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	5	5	300.000	5	303.017	5	306.030	5	321.332	5	395.494	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		g-Undangan				Perundang-Undangan yang Disediakan *****														
					Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					40.000.000		40.402.424		40.804.000		42.844.200		52.732.569	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	40.000.000	12	40.402.424	12	40.804.000	12	42.844.200	12	52.732.569	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi					200.000.000		202.011.619		204.020.000		214.221.002		263.662.846	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					SKPD *****															
		Terlaksanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	200.000.000	12	202.011.619	12	204.020.000	12	214.221.002	12	263.662.846	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					10.000.000		10.100.581		10.201.000		10.711.050		13.183.142	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksanya Penatausahaan Arsip				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.100.581	1	10.201.000	1	10.711.050	1	13.183.142	SUB BAGIAN UMUM DAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Dinamis pada SKPD				Dinamis pada SKPD *****													KEPEGAWAIAN	
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****						25.000.000		25.251.452		25.502.500		26.777.625		32.957.856	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Dokumen	2	2	25.000.000	2	25.251.452	2	25.502.500	2	26.777.625	2	32.957.856	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		pada SKPD				SKPD *****														
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						1.341.159.558		282.539.298		222.000.000		222.000.000		222.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Unit	5	12	1.341.159.558	11	282.539.298	11	222.000.000	11	222.000.000	11	222.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		memiliki nilai aset				disediakan ****														
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					1.115.159.558		0		0		0		0	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	1.115.159.558	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
					Pengadaan Mebel *****					80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Komunikasi dan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																			Informasi Digital	
		Tersediannya Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
					Pengadaan Aset Tak Berwujud *****					22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Tersediannya Aset Tak Berwujud				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	1	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
					Pengadaan Gedung Kantor atau					0		60.539.298		0		0		0	Dinas Komunikasi dan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Bangunan Lainnya *****														Informasi Digital	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	0	N/A	60.539.298	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					104.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	8	104.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	20.000.000	N/A	20.000.000	N/A	20.000.000	N/A	20.000.000	N/A	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						7.101.673.761		7.963.040.981		9.997.622.420		12.948.922.420		19.582.890.641	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan / Dokumen	4	27	7.101.673.761	27	7.963.040.981	27	9.997.622.420	27	12.948.922.420	27	19.582.890.641	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					1.700.000		1.700.000		1.700.000		2.000.000		2.500.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	2	2	1.700.000	2	1.700.000	2	1.700.000	2	2.000.000	2	2.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Menyurat *****														
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****					2.081.973.761		1.443.340.981		1.477.922.420		1.477.922.420		5.056.390.641	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	2.081.973.761	12	1.443.340.981	12	1.477.922.420	12	1.477.922.420	12	5.056.390.641	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					18.000.000		18.000.000		18.000.000		19.000.000		24.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000	1	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					5.000.000.000		6.500.000.000		8.500.000.000		11.450.000.000		14.500.000.000	Dinas Komunikasi dan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Kantor *****														Informasi Digital	
		Tersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	5.000.000.000	12	6.500.000.000	12	8.500.000.000	12	11.450.000.000	12	14.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						383.900.000		390.100.000		395.400.000		432.500.000		552.900.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	30	171	383.900.000	171	390.100.000	171	395.400.000	171	432.500.000	171	552.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas					200.000.000		200.000.000		200.000.000		210.000.000		250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Operasional atau Lapangan *****															
		Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	20	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	210.000.000	20	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi SEMARANG
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihar					0		0		0		0		0	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					aan dan Perizinan Alat Besar *****															
		Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				Jumlah Alat Besar yang Dipeliharadan Dibayarkan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
					Pemeliharaan Mebel *****					1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.700.000		2.100.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksanannya Pemeliharaan Mebel				Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	100	10	1.600.000	10	1.600.000	10	1.600.000	10	1.700.000	10	2.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																			KEPEGAWAIAN	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.500.000		15.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksanaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	4	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.500.000	25	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****					12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.800.000		15.800.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksanya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.800.000	4	15.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					78.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000		150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil	Unit	2	2	78.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Bangunan Lainnya				itasi *****														
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						61.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		90.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksanaanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10	106	61.000.000	106	65.000.000	106	70.000.000	106	75.000.000	106	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Kantor atau Bangunan Lainnya				yang Dipelihara/Direhabilitasi *****														
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****				21.300.000		21.500.000		21.800.000		22.500.000		30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Unit	4	4	21.300.000	4	21.500.000	4	21.800.000	4	22.500.000	4	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							555.510.977		1.070.000.000		1.085.000.000		1.085.000.000		1.095.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan				Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan	%	N/A	100	555.510.977	100	1.070.000.000	100	1.085.000.000	100	1.085.000.000	100	1.095.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		keuangan perangkat daerah di UPT Pusat Data				perangkat daerah UPT Pusat Data ***													Pusat Data	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						416.700.000		630.000.000		630.000.000		630.000.000		640.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Melakukan pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai				Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah pada UPT Pusat	%	N/A	30	416.700.000	60	630.000.000	70	630.000.000	90	630.000.000	100	640.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		standar layanan Dinas Komunikasi dan Digital pada UPT Pusat Data				Data yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran ****														
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****					7.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	N/A	1	7.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Bangunan Kantor				Bangunan Kantor yang Disediakan *****													Pusat Data	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					10.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	10.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Tersediannya Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersediannya Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Disediakan *****														
					Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					54.700.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	1	54.700.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan					300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital -	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Konsultasi SKPD *****														UPT Pusat Data	
		Terlaksanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						35.810.977		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Melakukan penyediaan barang milik daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan, sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Digital pada UPT Pusat Data				Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan UPT Pusat Data, selama satu tahun anggaran ****	Unit	N/A	1	35.810.977	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
					Pengadaan Mebel *****					35.810.977		250.0		250.0		250.0		250.0	Dinas Komunikasi dan	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
												00.000		00.000		00.000		00.000	Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Tersediaan ya Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	35.810.977	2	250.000.000	3	250.000.000	4	250.000.000	5	250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						3.000.000		10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Melakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Digital pada UPT Pusat Data				Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UPT Pusat Data ****	Laporan	N/A	1	3.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					3.000.000		10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital -	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																			UPT Pusat Data	
		Terlaksanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	1	3.000.000	2	10.000.000	3	25.000.000	4	25.000.000	5	25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						100.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Melakukan pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Digital pada UPT Pusat Data				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara ****	%	N/A	100	100.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
					Pemeliharaan Mebel *****					0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																			Pusat Data	
		Terlaksanya Pemeliharaan Mebel				Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	5	0	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	Unit	N/A	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital -	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital -

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****													UPT Pusat Data	UPT Pusat Data
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **									400.000.000		404.000.000		419.000.000		434.000.000		517.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **	Angka	2,738	3,02	400.000.000	2,8	404.000.000	2,9	419.000.000	3	434.000.000	3,01	517.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							400.000.000		404.000.000		419.000.000		434.000.000		517.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat	%	N/A	100	400.000.000	100	404.000.000	100	419.000.000	100	434.000.000	100	517.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital				daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital ***														
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****						400.000.000		404.000.000		419.000.000		434.000.000		517.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi				Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	%	100	100	400.000.000	100	404.000.000	100	419.000.000	100	434.000.000	100	517.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		perangkat daerah				yang disusun sesuai peraturan perundangan ****														
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****					200.000.000		202.000.000		214.000.000		224.000.000		270.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	5	5	200.000.000	5	202.000.000	5	214.000.000	5	224.000.000	5	270.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi Provinsi Jawa Tengah (35 Kabupaten/Kota) dan Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																				Lainnya, misal: DKI Jakarta, dll, DKI JAKARTA
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****					150.000.000		152.000.000		155.000.000		160.000.000		197.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	2	2	150.000.000	2	152.000.000	2	155.000.000	2	160.000.000	2	197.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Daerah *****															
		Terlaksanany a Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	25.000.000	N/A	25.000.000	N/A	25.000.000	N/A	25.000.000	N/A	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	25.000.000	N/A	25.000.000	N/A	25.000.000	N/A	25.000.000	N/A	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital

Sumber : E-Planning Renstra 2025-2029

Tabel 4. 2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Daerah	Rencana Aktifitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3		4	5	6
I	**Program Intervensi**					
1	Pengembangan Sistem	Pengembangan aplikasi layanan terintegrasi	2025 : Pagu : - Target - 2026 : Pagu : - Target 4 2027 : Pagu : - Target 4 2028 : Pagu : - Target 4 2029 : Pagu : - Target - 2030 : Pagu : - Target -		Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	Seluruh OPD
2	Penyusunan Pergub	Penyusunan kebijakan atau regulasi berupa peraturan gubernur tentang integrasi aplikasi di Jawa Tengah ke dalam aplikasi "Jateng Ngopeni"	2025 : Pagu : - Target - 2026 : Pagu : Rp. 150,000,000 Target 3 2027 : Pagu : Rp. 151,500,000 Target 4 2028 : Pagu : Rp. 151,500,000 Target 4 2029 : Pagu : Rp. 151,500,000 Target 4 2030 : Pagu : Rp. 151,500,000 Target 4		Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	Seluruh OPD
3	Pelaksanaan Integrasi Aplikasi	Pelaksanaan integrasi aplikasi yang dimulai dari pemetaan aplikasi, pembelian lisensi,	2025 : Pagu : - Target - 2026 : Pagu : Rp.2.272.531.960 Target 5 2027 : Pagu : Rp. 2.254.857.000 Target 5 2028 : Pagu : Rp.		Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	Seluruh OPD

		metode, arsitektur layanan, tenaga ahli/tim ahli, help desk, rapat koordinasi	2.277.406.000 Target 5 2029 : Pagu : Rp. 2.391.276.000 Target 5 2030 : Pagu : Rp. 2.943.179.000 Target 5			

No.	Program Daerah	Rencana Aktifitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3		4	5	6
II	**Program Prioritas**					
1	Pogram Prioritas	Pelatihan Public Speaking untuk Siswa SMA dan SMK di Jawa Tengah	2025 : Pagu : Rp. 25.000.000 Target 2 Kegiatan 2026 : Pagu : Rp. 25.000.000 Target 2 Kegiatan 2027 : Pagu : Rp. 25.000.000 Target 2 Kegiatan 2028 : Pagu : Rp. 25.000.000 Target 2 Kegiatan 2029 : Pagu : Rp. 25.000.000 Target 2 Kegiatan		Bidang Komunikasi Publik dan Media	Seluruh OPD

			2030 : Pagu : Rp. 25.000.000 Target 2 Kegiatan			
2	Pogram Prioritas	Internet untuk Kecamatan Berdaya	2025 : Pagu : Rp. 800.000.000 Target 149 2026 : Pagu : Rp. 2.000.000.000 Target 149 2027 : Pagu : Rp. 2.000.000.000 Target 149 2028 : Pagu : Rp. 2.000.000.000 Target 149 2029 : Pagu : Rp. 2.000.000.000 Target 149 2030 : Pagu : Rp. 2.000.000.000 Target 149		Bidang Infrastruktur Teknologi Digital	Seluruh OPD

No.	Program Daerah	Rencana Aktifitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3		4	5	6
I	**Program Aksi**					
1	Penyusunan Pergub Satuan Tugas Pengamanan	Penyusunan Revisi Pergub Sistem Manajemen	2025 : Pagu : Rp. 193.323.000 Target 1 2026 : Pagu : Rp. 263.920.000 Target 2	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Bidang Persandian dan Keamanan	Seluruh OPD

	Data Digital	Keamanan Informasi untuk mengakomodir Satuan Tugas Pengamanan Data Digital	2027 : Pagu : Rp. 343.000.000 Target 2 2028 : Pagu : Rp. 445.900.000 Target 2 2029 : Pagu : Rp. 579.670.000 Target 3 2030 : Pagu : Rp. 753.570.000 Target 3	Pemerintah Daerah Provinsi	Siber	
2	Penyusunan Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Data Digital Pergub	Implementasi Pencegahan dan Pengamanan Informasi dari ancaman insiden siber oleh Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) di Pemprov Jateng	2025 : Pagu : Rp. 525.790.000 Target 50 OPD 2026 : Pagu : Rp. 589.754.000 Target 50 OPD 2027 : Pagu : Rp. 629.754.000 Target 50 OPD 2028 : Pagu : Rp. 659.754.000 Target 50 OPD 2029 : Pagu : Rp. 689.754.000 Target 50 OPD 2030 : Pagu : Rp. 709.754.000 Target 50 OPD	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Bidang Persandian dan Keamanan Siber	Seluruh OPD

No.	Program Daerah	Rencana Aktifitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3		4	5	6

I	**Program Taktis**					
1	Program Taktis	Penyelenggaraan Forum Media dan Komunikasi Publik	2025 : Pagu : Rp. 874.762.000Target 30 2026 : Pagu : Rp. 600.000.000 Target 4 2027 : Pagu : Rp. 606.000.000 Target 6 2028 : Pagu : Rp. 612.060.000 Target 8 2029 : Pagu : Rp. 642.663.000 Target 10 2030 : Pagu : Rp. 790.988.000 Target 12		Dinas Komdigi	Seluruh OPD

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Kinerja instansi pemerintahan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja mencerminkan tugas dan fungsi organisasi dan pemilihan indikator kinerja didasarkan prioritas dan fokus organisasi.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan - penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasikan bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 4.3 dan 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4. 3 ***Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029***

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Angka	3,07	4,50	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks Pemerintahan Digital	Angka	-	2	2,1	2,3	2,3	2,7	3	3,1	3,1
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital,	Angka	-	-	4,03	4,08	4,15	4,23	4,23	4,27	4,27
	Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data terstruktur dan sistematis	Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Angka	-	-	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3
Meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	69,02	69,2	69,23	69,25	69,5	7,0	7,01	70,02	70,02

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah.	Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Angka	2,738	3,01	3,02	2,8	2,9	3	3,01	3,02	3,02
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	78	79	79,5	80	80,05	81	81,5	82	82

Sumber : E-planning Renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel 4.3, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yang selaras dengan salah satu sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, ditetapkan sebagai tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan. Adapun indikatornya yaitu Indeks Pemerintah Digital sebagai indikator. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menargetkan angka indeks Pemerintah Digital pada tahun 2026 sebesar 2,01, tahun 2027 sebesar 2,3, dan pada tahun 2028 sebesar 2,7, dan pada tahun 2029 sebesar 3. Indeks ini mengatur penguatan tata kelola pemerintah digital, penguatan teknologi pemerintah digital, pengembangan hingga implementasi digital serta penguatan persandian dan penguatan data. Sedangkan terkait dengan indikator Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi untuk mengukur sasaran meningkatnya layanan tata kelola data terstruktur dan sistematis, dengan angka target pada Tahun 2026 – 2029 masing – masing sebesar 4,85. Tingkat kematangan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mengatur sasaran meningkatnya pemanfaatan infrastruktur TIK dengan angka target pada Tahun 2026 sebesar 4,03 Tahun 2027 sebesar 4,08, Tahun 2028 sebesar 4,15 dan Tahun 2029 sebesar 4,23.

Tabel 4. 4 ***Indikator Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD***

NO	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Komunikasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan Informasi Digital							
2.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	78%	79%	79,5%	80%	80,5%	81%	81%
3.	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	85	81	85	86	87	88	88
4.	Indeks Satu Data Indonesia	-	85	86	87	88	89	89
5.	Tingkat Pemenuhan Layanan Digital	0	20	25	40	60	80	80
6.	Tingkat Pembangunan / Pengembangan Aplikasi	-	-	12	22	35	47	47
7.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	-	3,58	3,59	3,6	3,61	3,62	3,62
8.	Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	-	60	65	68	70	72	72

NO	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
9.	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data	-	100	100	100	100	100	100

Sumber : E-Planning Renstra 2025 - 2029

Berdasarkan tabel 4.4, Indikator Program Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai dua tujuan PD yaitu meningkatkan kapabilitas teknologi pemerintahan dan meningkatkan kualitas kualitas tata kelola perangkat daerah berintegrasi dan dinamis dengan 9 indikator program yaitu :

- Program Aplikasi Informatika - 3 Indikator
- Program IKP - 1 Indikator
- Program Persandian - 1 Indikator
- Program infrastruktur - 1 Indikator
- Program Penunjang - 3 Indikator

Tabel 4. 5 ***Tabel Indikator Kinerja Kunci***

No.	Indokator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Urusan Kominfo	%	%	%	%	%	%	%	%	
1.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskomdigi	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	

No.	Indokator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Urusan Statistik									
1.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Urusan Persandian									
1.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.	**Tambahan Urusan Kominfo**									

No.	Indokator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	

Pada Tabel 4.5 menjelaskan bahwa Diskominifo Provinsi Jawa Tengah memiliki 8 (Delapan) Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) pada urusanj Kominfo, Statisti, persandian sebagaimana dijelaskan dalam permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang peraturan pelaksanaan, Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Diskominfo Provinsi Jawa Tengah adalah **NIHIL** karena bukan termasuk perangkat daerah yang terkait 6 (Enam) urusan wajib Pelayanan Dasar.

BAB V

PENUTUP

Dokumen rencana strategis Diskomdigi Provinsi Jawa Tengan tahun 2025 - 2029 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman bagi Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun rencana kerja guna penyelenggaraan kegiatan pada urusan komdigi, statistik dan persandian di lingkup Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra Diskomdigi Prov. Jawa Tengah Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Prov. Jawa Tengah Tahun 2025-2029 terkait dengan kebijakan umum pembangunan dalam urusan komdigi, statistik dan persandian dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu strategis untuk mendukung peningkatan pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbasis Digital dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Keberhasilan program dan kegiatan Diskomdigi Prov. Jawa Tengah secara terpadu dapat mendukung tercapainya tujuan Perangkat Daerah yaitu "Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan" sekaligus juga mewujudkan tujuan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 yaitu "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan" khususnya untuk sasaran keempat yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif Serta Stabilitas Pembangunan Daerah".

Dalam mencapai tujuan tersebut, Diskomdigi Prov. Jateng melakukan berbagai strategi dan upaya, antara lain:

1. Melakukan penguatan pengelolaan layanan dan tata kelola infrastruktur TIK;
2. Mengoptimalkan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi;
3. Meningkatkan aplikasi berbagi pakai dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan/dikelola;
4. Mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai rencana induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas;

5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data statistic sektoral Jawa Tengah;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan layanan data statistik dan data geospasial;
7. Meningkatkan ketercapaian penyelenggaraan Big Data;
8. Meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital;
9. Menetapkan kebijakan tata kelola dan layanan kemanan informasi serta jarring komunikasi sandi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Mengoptimalkan pengelolaan informasi publik;
11. Meningkatkan kualitas konten informasi publik yang disebarluaskan baik melalui media internal maupun eksternal;
12. Meningkatkan keterbukaan Badan Publik.

Diharapkan melalui Renstra yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual pembangunan Diskomdigi, sehingga target indikator kinerja program (outcome) yang diharapkan, dapat tercapai dengan dukungan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di internal Diskomdigi beserta keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian karena ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dapat dilakukan review sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Diskomdigi Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Diskomdigi berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;

4. Renstra Diskomdigi Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah. Monitoring dan Evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

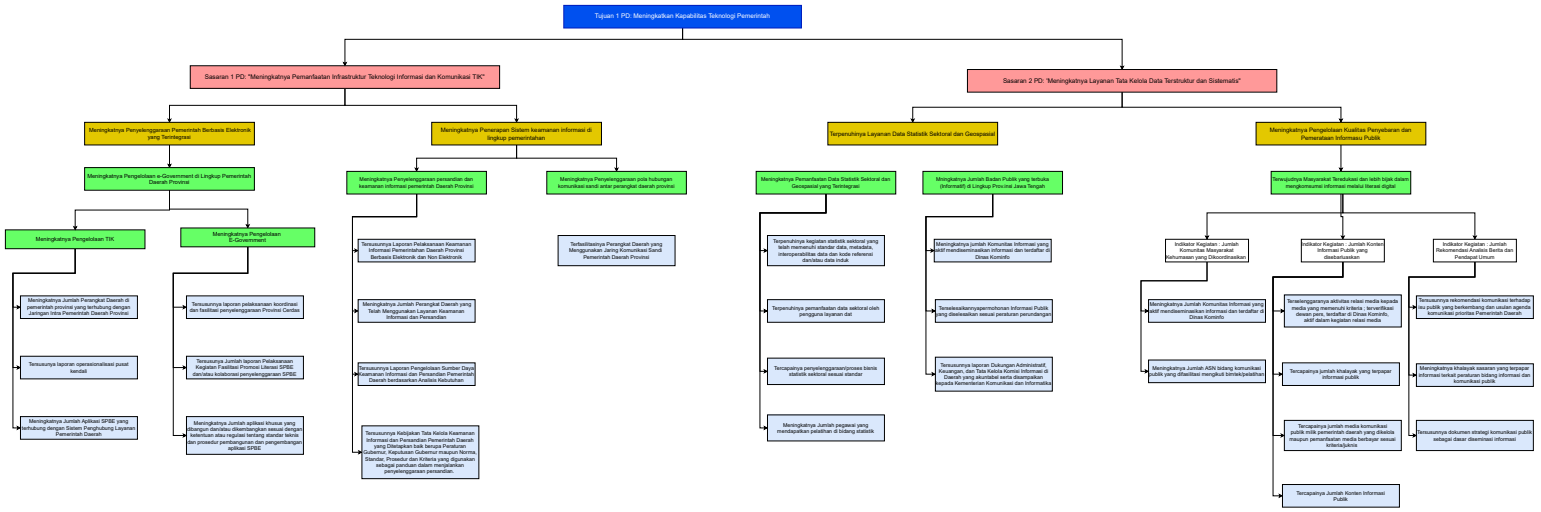
Tujuan 1 PD: Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintah
Sasaran 1 PD: "Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK"
Sasaran 2 PD: "Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan Sistematis"
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik yang Terintegrasi
Meningkatnya Penerapan Sistem keamanan informasi di lingkup pemerintahan
Terpenuhinya Layanan Data Statistik Sektoral dan Geospasial
Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Penyebaran dan Pemerataan Informasu Publik
Meningkatnya Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
Meningkatnya Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah Daerah Provinsi
Meningkatnya Penyelenggaraan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dan Geospasial yang Terintegrasi
Meningkatnya Jumlah Badan Publik yang terbuka (informatif) di Lingkup Provinsi Jawa Tengah
Terwujudnya Masyarakat Teredukasi dan lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi melalui literasi digital
Meningkatnya Pengelolaan TIK
Meningkatnya Pengelolaan E-Government
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Terfasilitasinya Perangkat Daerah yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Terpenuhinya kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk
Terpenuhinya Indikator Kegiatan : Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang Dikoordinasikan
Indikator Kegiatan : Jumlah Konten Informasi Publik yang diseluruhkan
Indikator Kegiatan : Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan Pendapat Umum
Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
Tersusunnya laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas
Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian
Terpenuhinya pemanfaatan data sektoral oleh pengguna layanan dat
Meningkatnya jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
Meningkatnya Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
Terselenggaranya aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria , terverifikasi dewan pers, terdaftar di Dinas Kominfo, aktif dalam kegiatan relasi media
Tersusunnya rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah
Tersusunnya laporan operasionalitasi pusat kendali
Tersusunnya Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
Tercapainya penyelenggaraan/proses bisnis statistik sektoral sesuai standar
Tercapainya penyelenggaraan/proses bisnis statistik sektoral sesuai standar
Tersesaikannyapermohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
Meningkatnya Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan
Tercapainya jumlah khalayak yang terpapar informasi publik
Meningkatnya khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik
Meningkatnya Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
Tersusunnya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.
Tersusunnya dokumen strategi komunikasi publik sebagai dasar diseminasi informasi
Tercapainya jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteriadjuknis
Tercapainya Jumlah Konten Informasi Publik

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DIGITAL

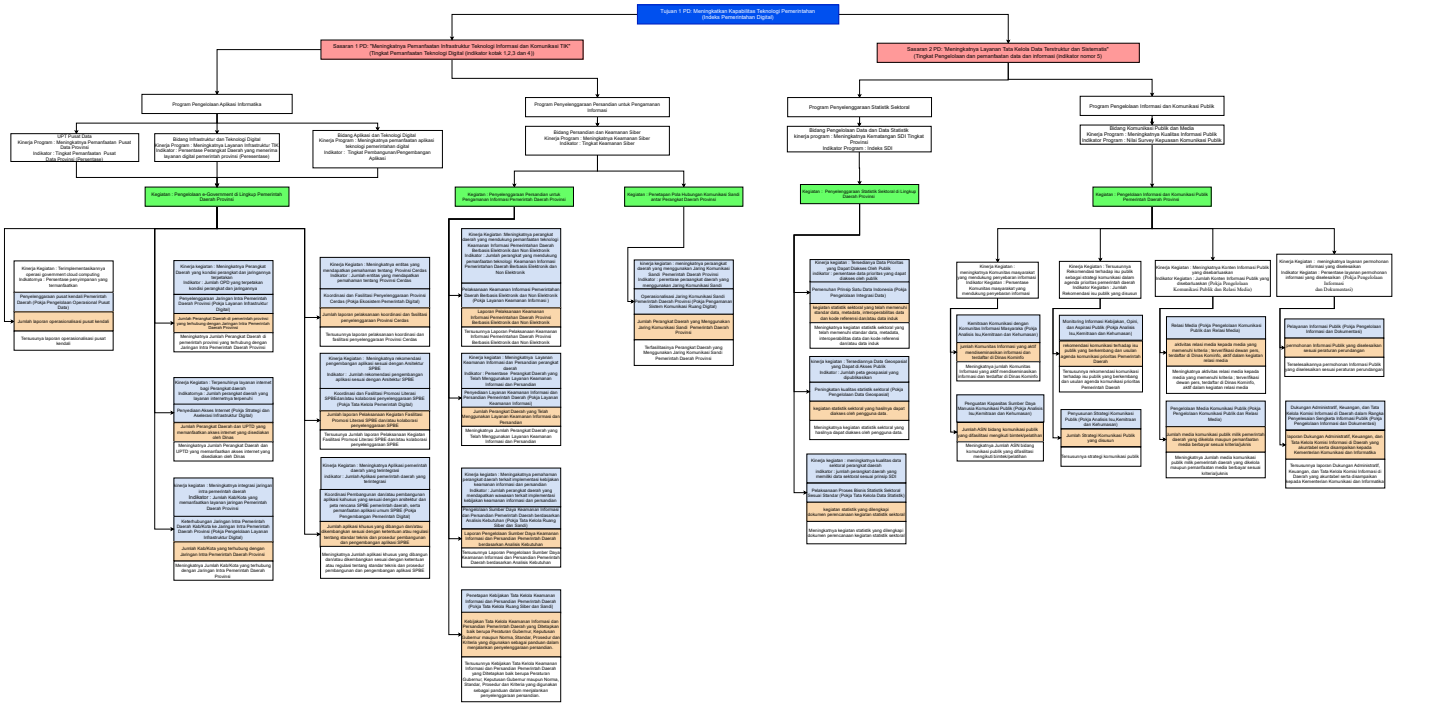

A. Identifikasi Risiko

Tabel 1

IDENTIFIKASI RISIKO

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Strategis	Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan *	Indeks Pemerintah Digital							Rendahnya tingkat kematangan indeks Pemdi	Risiko Kepatuhan	-Keterlambatan pemenuhan dokomen Pemdi - Ketidak singkronan dengan SPBE yang sedang berjalan - lemahnya kolaborasi dengan listas OPD - terbatasnya SDM - rendahnya partisipasi pulik - rendahnya keamanan informasi dan privasi - data tidak tersandar	Skor nllai pemdi turun	Pemerintah provinsi jawa tengah
Sasaran Strategis			Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK **	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital					Transformasi digital gagal dilakukan	Resiko Operasional	-Integrasi yang rumit dikarenakan tidak ada standar yang seragam dapat menyebabkan setiap lembaga pemerintahan membangun sistemnya sendiri, sehingga mempersulit integrasi data dan layanan antar-instansi -Keamanan data yang rentan	-Pengambilan keputusan yang tidak akurat -Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola layanan publik	Pemerintah provinsi jawa tengah
Sasaran Program					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA ***	Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi (Persentase)			Gangguan operasional pada Pusat Data Provinsi	Resiko Operasional	- Gangguan pada DC Facilities (power failure dan atau Kegagalan sistem pendingin) - Serangan siber (malware, DDoS) - Keterbatasan kapasitas server/storage - Human error dalam pengelolaan sistem	Layanan publik digital (e-government, aplikasi daerah, layanan data) tidak dapat diakses	Pemerintah provinsi jawa tengah
Sasaran Kegiatan							Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ****	Persentase penyimpanan yang termanfaatkan	Layanan Publik berbasis elektronik tidak dapat diakses/penurunan performa (melambat)	Resiko Operasional	Gangguan operasional pada layanan pusat data berupa: - Gangguan perangkat server/storage (kerusakan hardware, overheating, atau kehabisan kapasitas) - Kegagalan sistem pendingin dan listrik (power failure) - Kesalahan konfigurasi sistem (human error) - Serangan siber (malware, ransomware, atau DDoS) - Keterlambatan pemeliharaan infrastruktur pusat data	Masyarakat tidak dapat mengakses layanan publik berbasis elektronik	Pemerintah provinsi jawa tengah
Sasaran Program						Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan digital pemerintah provinsi			Layanan Digital kepada perangkat daerah terhenti	Resiko Operasional	Pengelolaan layanan digital kepada perangkat daerah tidak optimal	Lumpuhnya layanan digital pemerintahan dan publik	-Seluruh OPD lingkup Pemprov Jateng '-Masyarakat pengguna layanan digital publik"

Sasaran Kegiatan							Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ****	Jumlah OPD yang terpetakan kondisi perangkat dan jaringannya	Gangguan operasional pada perangkat jaringan internet yang rusak atau tidak memenuhi standar tidak dapat segera ditangani	Resiko Operasional	- Keterbatasan stok perangkat pengganti - Proses pengadaan yang memerlukan waktu lebih lama dan mengikuti regulasi penggunaan produk dalam negeri. Sedangkan perangkat jaringan yang digunakan tidak ditemukan barang subtitusi yang sebanding - Keterbatasan teknisi atau tim operasional	Lumpuhnya operasional kegiatan OPD	Seluruh OPD
Sasaran Kegiatan								Jumlah perangkat daerah yang layanan internetnya terpenuhi	Gangguan operasional pada jaringan Jateng Online	Resiko Operasional	- Terjadi gangguan pada sumber internet menyebabkan seluruh koneksi Jateng Online ke OPD terhenti (blackout) - Terjadinya FO Cut pada Jaringan Jateng Online - Terdapat gangguan perangkat jaringan induk	Terhentinya operasional layanan pemerintah dan publik serta menurunnya kepercayaan masyarakat.	- Seluruh OPD lingkup Pemprov Jateng - Masyarakat pengguna layanan digital publik
Sasaran Kegiatan								Jumlah Kab/Kota yang memanfaatkan layanan jaringan Pemerintah Daerah Provinsi	Gangguan operasional pada jaringan integrasi Kab/Kota	Resiko Operasional	- Terdapat gangguan perangkat jaringan Metro Kab/Kota - Terdapat gangguan pada jaringan penyedia Metro	Gangguan pada jaringan metro menyebabkan kabupaten/kota tidak dapat mengakses layanan publik digital miliknya yang ditempatkan di data center provinsi	Seluruh Kab/Kota
Sasaran Program					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA ***	Tingkat Pembangunan/Pengembangan Aplikasi			Pembangunan/pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	Resiko Operasional	- Penerapan Arsitektur SPBE belum dipahami secara menyeluruh - Kurangnya koordinasi dan komitmen antar OPD untuk integrasi data dan layanan	- Data antar aplikasi tidak sinkron dan sulit dimanfaatkan bersama - Efisiensi layanan digital menurun - Menghambat terwujudnya ekosistem pemerintahan digital terpadu	OPD Pemprov Masyarakat
Sasaran Kegiatan							Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ****	Jumlah entitas yang mendapatkan pemahaman tentang Provinsi Cerdas sesuai dengan Rencana Induk Smart Province	Rendahnya jumlah entitas yang memahami konsep dan implementasi Provinsi Cerdas sesuai Renduk Smart Province	Risiko Operasional	- Sosialisasi dan pendampingan belum menjangkau seluruh entitas dan tidak dilakukan secara berkala - Koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan masih terbatas dan tidak dilakukan secara berkala	- Implementasi Smart Province tidak berjalan selaras dan tidak terarah antar sektor - Keterlambatan pencapaian target Renduk - Rendahnya komitmen dan kolaborasi antar entitas	OPD Pemprov Masyarakat
Sasaran Kegiatan								Jumlah rekomendasi teknis pengembangan aplikasi sesuai dengan Arsitektur SPBE	Rekomendasi teknis pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	Risiko Operasional	- Penerapan Arsitektur SPBE belum dipahami secara menyeluruh - Belum tersedia panduan teknis yang lengkap dan terstandardisasi	- Terjadinya duplikasi aplikasi dan inefisiensi sumber daya TI - Ketidakterpaduan data dan layanan antar aplikasi pemerintah - Penurunan nilai maturitas SPBE bidang aplikasi dan arsitektur	OPD Pemprov Masyarakat

Sasaran Kegiatan								Presentase Aplikasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Rendahnya persentase aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi dengan sistem lain	Risiko Operasional	- Kurang/tidak meratanya tim teknis dan anggaran integrasi di OPD - Tidak adanya standar integrasi dan interoperabilitas yang dipatuhi	- Data antar aplikasi tidak sinkron dan sulit dimanfaatkan bersama - Efisiensi layanan digital menurun - Menghambat terwujudnya ekosistem pemerintahan digital terpadu	OPD Pemprov Masyarakat
Sasaran Program					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI ***	Tingkat Keamanan Siber			Terjadi peretasan terhadap domain jatengprov.go.id	Resiko Operasional	Belum ada sosialisasi dan koordinasi penerapan standar SMKI di perangkat daerah	Meningkatknya jumlah insiden keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah provinsi jawa tengah	OPD Pemprov Masyarakat
Sasaran Kegiatan							Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi ****	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan wawasan terkait implementasi kebijakan keamanan informasi dan persandian	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam kegiatan sosialisasi keamanan informasi rendah	Resiko Operasional	Materi sosialisasi tidak relevan dengan isu keamanan informasi di perangkat daerah	Penerapan kebijakan keamanan informasi tidak dapat diterapkan secara menyeluruh	OPD Pemprov Masyarakat
									Kegagalan terhadap pelindungan data pribadi pengguna layanan pemerintah provinsi jawa tengah	Risiko Kepatuhan	Perangkat daerah belum menerapkan kaedah PDP pada Sistem elektronik	- ketidakpatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi; - Sanksi hukum berdasarkan peraturan perundangan	OPD Pemprov
									Risiko keamanan informasi pada sistem elektronik perangkat daerah tidak terpetakan	Resiko Operasional	Sistem Elektronik Perangkat Daerah yang belum memenuhi standar SMKI	Penerapan kontrol keamanan tidak sesuai dengan standar keamanan, memungkinkan celah risiko keamanan tidak ditangani dengan baik	OPD Pemprov
Sasaran Kegiatan								Jumlah perangkat daerah yang mendukung pemanfaatan teknologi keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan nonelektronik	Kehilangan data dan informasi dari sistem elektronik yang disebabkan oleh virus dan malware;	Risiko Reputasi	- Terdapat celah keamanan pada aplikasi milik perangkat daerah yang belum ditindaklanjuti. - Perangkat daerah tidak melakukan prosedur backup restore dengan baik.	- Menurunnya tingkat kepercayaan publik;	OPD Pemprov Masyarakat
									Kebocoran informasi pemerintah provinsi yang bersifat penting atau rahasia	Resiko Operasional	Jalur komunikasi untuk mengirimkan informasi tidak menggunakan jalur yang aman	Informasi penting atau rahasia dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengganggu atau membatalkan efektivitas rencana Pemprov	OPD Pemprov Masyarakat
									Pemalsuan dokumen elektronik pemerintah provinsi jawa tengah	Resiko Operasional	Dokumen dan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi jawa tengah tidak menggunakan TTE	Memperlambat kinerja pelayanan publik karena perlu melakukan verifikasi keaslian dokumen	OPD Pemprov Masyarakat

								Jumlah SDM persandian dan keamanan informasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Penyalahgunaan data dan informasi strategis milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Resiko Operasional	- Kurangnya kesadaran pegawai mengenai keamanan informasi; - Tidak menerapkan manajemen kontrol akses pada Sistem Elektronik; - Pengguna aplikasi tidak melakukan pergantian password secara berkala;	Data dan informasi digunakan pihak yang tidak berwenang untuk melakukan penipuan	OPD Pemprov Masyarakat
								Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian	Pemenuhan permintaan layanan keamanan informasi melebihi batas perjanjian layanan	Resiko Operasional	Dokumentasi pengembangan aplikasi yang tidak lengkap, fungsi keamanan aplikasi yang tidak diterapkan	Perangkat daerah mencari solusi di luar layanan internal yang belum terjamin keamanannya	OPD Pemprov
									Terjadinya gangguan layanan elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Resiko Operasional	Adanya serangan siber pada sistem elektronik pendukung layanan	Layanan elektronik pemerintah provinsi jawa tengah tidak dapat diakses / digunakan;	OPD Pemprov Masyarakat
									Penyadapan atau kebocoran informasi rahasia melalui perangkat komunikasi nirkabel yang tidak sah	Resiko Operasional	Tidak dilakukan pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal pada kegiatan penting pemerintah provinsi jawa tengah	Terungkapnya isi rapat pimpinan, bocornya dokumen rahasia, kegagalan kegiatan pimpinan	
Sasaran Kegiatan							Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi ****	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	Akses ilegal ke akun email sanapati yang digunakan sebagai sarana Jaring Komunikasi Sandi	Resiko Operasional	- Pengguna melakukan sharing user dan password, - Terdapat pencurian akun	Informasi dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang	
Sasran Strategis			Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan Sistematis **	Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi					Menurunnya nilai keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah	Risiko Reputasi	Masih adanya ego sektoral dalam pemenuhan instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Menurunnya kategori keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah	SKPD Pemprov Jateng Masyarakat
Sasaran Program					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK ***	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik			Menurunnya nilai survey komunikasi publik	Risiko Reputasi	1. Belum optimalnya kegiatan monitoring dan pemetaan informasi publik 2. Kurangnya media komunikasi publik yang digunakan 3. Kurangnya partisipasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi	Masyarakat kurang percaya dan puas terhadap layanan komunikasi publik	SKPD Pemprov Jateng Masyarakat

Sasaran Kegiatan							Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi ****	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi	Rendahnya persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif mendukung penyebaran informasi publik dapat menghambat efektivitas diseminasi informasi pemerintah daerah kepada masyarakat.	Resiko Operasional	•Kurangnya kapasitas dan literasi digital anggota KIM dalam mengelola serta menyebarkan informasi publik. •Koordinasi dan pendampingan yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan KIM. •Rendahnya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan komunikasi publik. •Kurangnya inovasi dan adaptasi media komunikasi sesuai dengan tren digital dan kebutuhan audiens.	• Informasi program dan kebijakan pemerintah daerah tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat. • Berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akibat kurangnya informasi yang akurat. • Potensi meningkatnya disinformasi dan hoaks di masyarakat.	SKPD Pemprov Jateng Masyarakat
Sasaran Kegiatan								Jumlah Rekomendasi Isu Publik yang Disusun	Isu hoaks dan pemberitaan dengan sentiment negatif semakin menyebar luas	Resiko Operasional	1. SKPD Pemprov Jateng belum menindaklanjuti isu dengan sentiment negatif 2. Kesulitan menelusuri informasi hoaks terkait Jateng	Hoaks dan pemberitaan dengan sentiment negatif semakin meluas, menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun	SKPD Pemprov Jateng Masyarakat
Sasaran Kegiatan								Jumlah Konten Informasi Publik yang Disebarluaskan	Kurangnya penyebarluasan informasi hasil pembangunan kepala daerah	Resiko Operasional	Kurangnya media komunikasi publik yang digunakan	Masyarakat tidak mengetahui informasi terkait hasil pembangunan	SKPD Pemprov Jateng Masyarakat
Sasaran Kegiatan								Persentase Permohonan Layanan Informasi yang Diselesaikan	Menurunnya jumlah permohonan informasi yang terselesaikan sesuai peraturan perundangan	Resiko Operasional	- Kurangnya pemahaman petugas pelayanan informasi - Kurangnya komitmen pimpinan badan publik terhadap pentingnya pelayanan informasi publik	- Permohonan informasi tidak terselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; - Informasi publik tidak tersampaikan ke masyarakat - Meningkatnya jumlah sengketa informasi publik	SKPD Pemprov Jateng Masyarakat
Sasaran Program					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL ***	Indeks Satu Data Indonesia (SDI)			Menurunnya hasil penilaian penerapan SDI di Pemprov Jateng	Resiko Operasional	1. Komitmen para penyelenggara Satu Data Jawa Tengah kurang 2. Kompetensi teknis dan non teknis para penyelenggara kurang	Kepercayaan pengguna data terhadap kualitas data Jawa Tengah kurang	Pemprov Jateng
Sasaran Kegiatan							Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi ****	Persentase Data Prioritas yang dapat diakses publik	Data Prioritas tidak memenuhi prinsip Satu Data	Resiko Operasional	1. Komitmen pemenuhan data data produsen data kurang 2. Pengelolaan data sektoral di perangkat daerah belum optimal	Akses terhadap data prioritas daerah terhambat	SKPD Prov. Jateng Pengguna data lainnya

Sasaran Kegiatan								Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Data Sektoral sesuai Prinsip SDI	Data Sektoral Daerah kurang berkualitas	Resiko Operasional	1. Pengelolaan data sektoral di perangkat daerah belum optimal 2. Kompetensi produsen data tentang pengelolaan data kurang 3. Belum adanya sistem monev dari Walidata Daerah terhadap penerapan pengelolaan data sektoral	Pengguna data mengakses data yang kurang berkualitas	SKPD Prov. Jateng Pengguna data lainnya
Sasaran Kegiatan								Jumlah Data Geospasial yang dipublikasikan	Tidak tersedianya data geospasial yang berkualitas	Resiko Operasional	Kurangnya komitmen terhadap penyediaan data geospasial yang berkualitas	Data geospasial blm bisa dimanfaatkan oleh pengguna data sehingga belum bisa dipakai untuk menganalisis suatu kerbijakan	SKPD Prov. Jateng Pengguna data lainnya
Sasaran Strategis	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital *	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							Rendahnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis	Resiko Operasional	Standar pelayanan tidak dilaksanakan dengan optimal	Penurunan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	
Sasaran Strategis			Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **	Indeks Kepuasan Masyarkat Perangkat Daerah					Keterlambatan Respon dan Tanggapan terhadap permintaan Pelayanan Publik	Risiko Reputasi	-SOP tidak dijalankan dengan baik '-Kurangnya sosialisasi layanan Diskomidigi	Waktu pelayanan menjadi lebih lama	
Sasaran Program					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			Target persentase pelayanan umum,kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak tercapai	Risiko Operasional	Dokumen SOP belum dimutakhirkan	Pelayanan tidak maksimal	Seluruh pegawai dan masyarakat umum yang terkait
Sasaran Kegiatan							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terlambatnya penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Kurang validnya data dukung kinerja	Tidak terukurnya capaian kinerja	Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Kegiatan							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran	Kurang berkualitasnya pemeliharaan dan administrasi BMD	Risiko Operasional	Tidak tersedianya dokumen BMD yang akuntabel	Pemelihaan BMD tidak bisa mencakup seluruh barang	Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Kegiatan							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran	Terlambatnya proses layanan kepegawaian dan administrasi umum	Risiko Operasional	Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tidak sesuai dengan standar	Kinerja Pegawai Menurun dan kesejahteraan pegawai menjadi berkurang	Seluruh pegawai Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Kegiatan							Administrasi Umum Perangkat Daerah ****	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran	Tidak terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Risiko Operasional	Penyesuaian Alokasi Anggaran	Terganggunya penyelenggaraan kegiatan kantor	Pegawai Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Kegiatan							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****	Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran	Kualitas spesifikasi pengadaan BMD tidak sesuai standar	Risiko Fraud	Timbulnya penyelewengan baik dari faktor administrasi ataupun fisik	Aktivitas operasional perkantoran terhambat dan Kerugian keuangan negara	Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Kegiatan							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran	Spesifikasi website/aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan OPD	Risiko Operasional	Adanya database yang besar sehingga tidak mampu ditampung oleh penyedia	Terganggunya layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah	Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah, dan masyarakat pengguna layanan
Sasaran Kegiatan							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran	Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Rehab Gedung	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen penyedia terhadap jadwal dan kualitas pekerjaan	Terganggunya penyelenggaraan kegiatan kantor	Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Strategis			Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **	Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah					Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah tidak berkualitas dan hanya sebatas pemenuhan dokumen	Resiko Kebijakan	Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam menerapkan pengelolaan risiko	Perencanaan Kegiatan Perangkat daerah kurang baikkarena tidak menerapkan pengelolaan risiko	Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Program					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah			Kinerja perangkat daerah tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan	Resiko Operasional	-Monitoring dan evaluasi kegiatan perangkat daerah tidak dilaksanakan dengan efektif - Perencanaan kegiatan yang kurang tepat	Terlambatnya pencapaian kinerja kegiatan perangkat daerah	Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Kegiatan							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	Risiko Operasional	SOP penyusunan dokumen perencanaan tidak dilaksanakan dengan baik	Kegiatan perangkat daerah tidak terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

B. Analisis Risiko

Tabel 2

ANALISIS RISIKO

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala/Nilai RIsiko Residu		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran Program										
1	Gangguan operasional pada Pusat Data Provinsi	4	4	16	Ada	- Dibentuknya Tim Server dan jadwal jaga data center (Piket) untuk monitoring kinerja server 7x24 jam/hari - Penunjukan PIC di masing-masing SKPD Prov dan Pemda Kab/Kota untuk fasilitasi permohonan hosting/vps/colocation/backup di data center - Pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana data center - Pemenuhan kekurangan sarana prasarana data center yang masih kurang	Memadai	3	4	12
2	Layanan Digital kepada perangkat daerah terhenti	4	5	20	Ada	- Sosialisasi regulasi/SOP kepada pengguna layanan - Pengawasan secara berjenjang - Pembangunan aplikasi sebagai alat bantu monitoring dan dokumentasi	Memadai	3	4	12
3	Pembangunan/pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	3	4	12	Ada	1. Penyelarasan Arsitektur SPBE dan penyusunan Renduk Smart Province sebagai dasar integrasi sistem 2. Penerapan portal layanan untuk memfasilitasi integrasi antar aplikasi 3. Koordinasi rutin dengan OPD pengelola aplikasi untuk sinkronisasi data dan sistem	Memadai	2	3	6
4	Terjadi peretasan terhadap domain jatengprov.go.id	4	5	20	Ada	1. Pembentukan JatengProv CSIRT 2. Bimtek Keamanan Siber bagi agen CSIRT 3. Penerapan Pergub Jateng 25/2023 tentang SMKI	Belum Memadai	4	3	12
5	Menurunnya nilai survey komunikasi publik	3	4	12	Ada	1. Monitoring dan pemetaan informasi publik 2. Publikasi di berbagai kanal media 3. Koordinasi dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Memadai	3	3	9
6	Menurunnya hasil penilaian penerapan SDI di Pemprov Jateng	4	4	16	Ada	Penyusunan Juknis turunan Pergub	Belum Memadai	3	4	12
7	Target persentase pelayanan umum,kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak tercapai	2	3	6	Ada	Pemutakhiran SOP pelayanan umum,kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah.	Belum Memadai	1	3	3
8	Kinerja perangkat daerah tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan	3	3	9	Ada	-Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dilaksanakan setiap bulan-Rakor Perencanaan dan Evaluasi	Belum Memadai	2	4	8
Sasaran Kegiatan										
1	Layanan Publik berbasis elektronik tidak dapat diakses/penurunan performa (melambat)	4	4	16	Ada	- Sosialisasi regulasi/SOP kepada pengguna layanan - Pengawasan secara berjenjang - Pembangunan aplikasi sebagai alat bantu monitoring dan dokumentasi	Memadai	3	4	12
2	Gangguan operasional pada perangkat jaringan internet yang rusak atau tidak memenuhi standar tidak dapat segera ditangani	4	3	12	Ada	1. Monitoring dan pemeliharaan perangkat secara berkala 2. Inventarisasi kondisi dan kebutuhan perangkat 3. Peningkatan kapasitas SDM untuk perbaikan ringan	Memadai	3	2	6
3	Gangguan operasional pada jaringan Jateng Online	3	5	15	Ada	1. Penyediaan link internet ganda 2. Penyediaan proteksi keamanan Anti DDOS 3. Peningkatan kapasitas SDM untuk *troubleshooting*	Memadai	3	4	12
4	Gangguan operasional pada jaringan integrasi Kab/Kota	4	3	12	Ada	Penguatan kolaborasi dengan penyedia layanan dan kabupaten/kota dalam monitoring, perbaikan, serta pendataan kebutuhan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu serta personil	Memadai	4	2	8
5	Rendahnya jumlah entitas yang memahami konsep dan implementasi Provinsi Cerdas sesuai Renduk Smart Province	3	3	9	Ada	Penguatan kolaborasi dan pemantauan implementasi Smart Province dengan stakeholder terkait melalui sosialisasi, desk, FGD	Memadai	2	3	6

	Rekomendasi teknis pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	3	4	12	Ada	1. Monev pengembangan aplikasi 2. Penyelarasan Arsitektur SPBE Pemda	Memadai	2	4	8
	Rendahnya persentase aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi dengan sistem lain	3	4	12	Ada	1. Penyelarasan Arsitektur SPBE dan penyusunan Renduk Smart Province sebagai dasar integrasi sistem 2. Penerapan portal layanan untuk memfasilitasi integrasi antar aplikasi 3. Koordinasi rutin dengan OPD pengelola aplikasi untuk sinkronisasi data dan sistem	Memadai	2	3	6
	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam kegiatan sosialisasi keamanan informasi rendah	3	3	9	Ada	1. Koordinasi kegiatan SMKI antara kab/kota provinsi jawa tengah dan BSSN 2. Bimtek/Sosialisasi keamanan informasi bagi OPD 3. Bimtek/Sosialsiasi keamanan informasi bagi Kab/Kota	Memadai	1	3	3
	Kegagalan terhadap pelindungan data pribadi pengguna layanan pemerintah provinsi jawa tengah	2	5	10	Ada	1. Tindak lanjut penanganan insiden kebocoran data; 2. Budaya Literasi Keamanan Informasi & Pelindungan Data Pribadi	Belum Memadai	2	4	8
	Risiko keamanan informasi pada sistem elektronik perangkat daerah tidak terpetakan	3	4	12	Ada	1. Identifikasi risiko keamanan informasi 2. Pengisian Profil Risiko Kamsiber	Belum Memadai	2	4	8
	Kehilangan data dan informasi dari sistem elektronik yang disebabkan oleh virus dan malware;	2	3	6	Ada	1. Implementasi antivirus, 2. Pelaksanaan Prosedur Backup 3. Uji coba restore 4. Penyusunan skenario dan pelaksanaan simulasi BCP	Memadai	2	2	4
	Kebocoran informasi pemerintah provinsi yang bersifat penting atau rahasia	2	3	6	Ada	1. Implementasi SSL, 2. Pelaksanaan Uji Keamanan, 3. Manajemen Insiden Siber, 4. Penerapan Intelejen Ancaman, 5. Patroli siber 6. Pengelolaan Email ASN	Memadai	1	3	3
	Pemalsuan dokumen elektronik pemerintah provinsi jawa tengah	1	4	4	Ada	1. Implementasi TTE BsRE 2. Integrasi TTE ke sistem elektronik 3. Pendampingan penerbitan sertifikat elektronik	Memadai	1	3	3
	Penyalahgunaan data dan informasi strategis milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2	4	8	Ada	1. Awareness KI di sosial media melalui KAMISAN (Keamanan Siber dan Sandi), 2. Webinar keamanan siber, 3. Penilaian Tingkat Keamanan Informasi (Indeks KAMI) 4. Evaluasi kebijakan dan prosedur keamanan informasi 5. Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Informasi 6. Pelaksanaan sertifikasi ISO 27001	Memadai	1	4	4
	Pemenuhan permintaan layanan keamanan informasi melebihi batas perjanjian layanan	2	3	6	Ada	1. SOP Rekomtek 2. Monitoring tindak lanjut insiden 3. Montoring kerentanan sistem elektronik	Memadai	1	3	3
	Terjadinya gangguan layanan elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	3	4	12	Ada	1. Penggunaan *Web Application Firewall* 2. Pelaksaanaan ITSA BSSN	Memadai	2	3	6
	Penyadapan atau kebocoran informasi rahasia melalui perangkat komunikasi nirkabel yang tidak sah	1	5	5	Ada	1. Fasilitasi layanan pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal (Jammer) 2. Perawatan alat jammer secara berkala	Memadai	1	4	4

	Akses ilegal ke akun email sanapati yang digunakan sebagai sarana Jaring Komunikasi Sandi	2	3	6	Ada	1. Notifikasi perubahan password secara berkala, 2. Konfigurasi password, 3. Sosialisasi penggunaan email sanapati	Memadai	2	2	4
	Rendahnya persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif mendukung penyebaran informasi publik dapat menghambat efektivitas diseminasi informasi pemerintah daerah kepada masyarakat.	3	4	12	Ada	1. Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat melalui Kompetisi atau perlombaan 2. peningkatan kapasitas kelompok FK Metra maupun KIM melalui pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, dan workshop	Memadai	2	4	8
	Isu hoaks dan pemberitaan dengan sentiment negatif semakin menyebar luas	3	4	12	Ada	1. Peningkatan kapasitas Tim Analis Berita SKPD Pemprov Jateng untuk menindaklanjuti pemberitaan dengan sentiment negatif 2. Peningkatan kerjasama dengan Kominfo Kab/Kota dan Mafindo dalam rangka meminimalisir berita hoaks	Memadai	2	4	8
	Kurangnya penyebarluasan informasi hasil pembangunan kepala daerah	3	4	12	Ada	Peningkatan kerja sama dengan media	Memadai	2	4	8
	Menurunnya jumlah permohonan informasi yang terselesaikan sesuai peraturan perundangan	3	4	12	Ada	1. Peningkatan kapasitas pengelola PPID melalui pelatihan, bintek, dan workshop2. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Inform	Memadai	2	4	8
	Data Prioritas tidak memenuhi prinsip Satu Data	4	4	16	Ada	1. Pengembangan Portal Data Jawa tengah2. Koordinasi teknis dengan perangkat daerah/instansi dalam rangka penyediaan data prioritas	Belum Memadai	3	4	12
	Data Sektoral Daerah kurang berkualitas	4	4	16	Ada	Peningkatan kualitas kegiatan pemeriksaan data sektoral	Belum Memadai	3	4	12
	Tidak tersedianya data geospasial yang berkualitas	3	3	9	Ada	-Desk Pengumpulan dafatar data geospasial-Bimbingan Teknis Pengelolaan SImpul Jaringan	Memadai	2	3	6
	Terlambatnya penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	Revisi secara berkala terhadap SOP layanan pada subbag keuanganPeningkatan kompetensi untuk pegawai yang menangani laporan keuanga	Memadai	1	2	2
	Kurang berkualitasnya pemeliharaan dan administrasi BMD	3	2	6	Ada	Pendataan aset yang lebih komprehensif	Memadai	2	2	4
	Terlambatnya proses layanan kepegawaian dan administrasi umum	2	3	6	Ada	Revisi secara berkala terhadap SOP layanan kepegawaian.Peningkatan kompetensi untuk pegawai yang menangani kepegawaian.	Memadai	2	2	4
	Tidak terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	2	3	6	Ada	Memperbaiki daftar prioritas kebutuhan layanan umum selama satu tahun	Memadai	1	3	3
	Kualitas spesifikasi pengadaan BMD tidak sesuai standar	2	5	10	Ada	Melaksanakan koordinasi dengan pihak penyedia untuk memastikan BMD memenuhi standar yang berlaku.	Memadai	2	4	8
	Spesifikasi website/aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan OPD	2	3	6	Ada	Mengoptimalkan fitur layanan dalam website Diskomdigi	Memadai	1	3	3
	Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Rehab Gedung	3	3	9	Ada	Melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan pekerjaan serta jaminan pemeliharaan hasil pekerjaan.	Memadai	2	3	6

	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	2	5	10	Ada	Rapat Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi	Memadai	1	4	4

C. Penetapan Risiko Prioritas

Tabel 3
PENETAPAN RISIKO PRIORITAS

No.	Risiko Prioritas	Skala	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5	6
Sasaran Program					
1	Gangguan operasional pada Pusat Data Provinsi	16	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	- Gangguan pada DC Facilities (power failure dan atau Kegagalan sistem pendingin) - Serangan siber (malware, DDoS) - Keterbatasan kapasitas server/storage - Human error dalam pengelolaan sistem	Layanan publik digital (e-government, aplikasi daerah, layanan data) tidak dapat diakses
2	Layanan Digital kepada perangkat daerah terhenti	20	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	Pengelolaan layanan digital kepada perangkat daerah tidak optimal	Lumpuhnya layanan digital pemerintahan dan publik
3	Pembangunan/pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	12	Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Digital	- Penerapan Arsitektur SPBE belum dipahami secara menyeluruh - Kurangnya koordinasi dan komitmen antar OPD untuk integrasi data dan layanan	- Data antar aplikasi tidak sinkron dan sulit dimanfaatkan bersama - Efisiensi layanan digital menurun - Menghambat terwujudnya ekosistem pemerintahan digital terpadu

4	Terjadi peretasan terhadap domain jatengprov.go.id	20	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber	Belum ada sosialisasi dan koordinasi penerapan standar SMKI di perangkat daerah	Meningkatknya jumlah insiden keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah provinsi jawa tengah
5	Menurunnya nilai survey komunikasi publik	12	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media	1. Belum optimalnya kegiatan monitoring dan pemetaan informasi publik 2. Kurangnya media komunikasi publik yang digunakan 3. Kurangnya partisipasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi	Masyarakat kurang percaya dan puas terhadap layanan komunikasi publik
6	Menurunnya hasil penilaian penerapan SDI di Pemprov Jateng	16	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	1. Komitmen para penyelenggara Satu Data Jawa Tengah kurang 2. Kompetensi teknis dan non teknis para penyelenggara kurang	Kepercayaan pengguna data terhadap kualitas data Jawa Tengah kurang
Sasaran Kegiatan					

	Layanan Publik berbasis elektronik tidak dapat diakses/penurunan performa (melambat)	16	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	Gangguan operasional pada layanan pusat data berupa: - Gangguan perangkat server/storage (kerusakan hardware, overheating, atau kehabisan kapasitas) - Kegagalan sistem pendingin dan listrik (power failure) - Kesalahan konfigurasi sistem (human error) - Serangan siber (malware, ransomware, atau DDoS) - Keterlambatan pemeliharaan infrastruktur pusat data	Masyarakat tidak dapat mengakses layanan publik berbasis elektronik
	Gangguan operasional pada perangkat jaringan internet yang rusak atau tidak memenuhi standar tidak dapat segera ditangani	12	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	- Keterbatasan stok perangkat pengganti - Proses pengadaan yang memerlukan waktu lebih lama dan mengikuti regulasi penggunaan produk dalam negeri. Sedangkan perangkat jaringan yang digunakan tidak ditemukan barang subtitusi yang sebanding - Keterbatasan teknisi atau tim operasional	Lumpuhnya operasional kegiatan OPD

	Gangguan operasional pada jaringan Jateng Online	15	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	- Terjadi gangguan pada sumber internet menyebabkan seluruh koneksi Jateng Online ke OPD terhenti (blackout) - Terjadinya FO Cut pada Jaringan Jateng Online - Terdapat gangguan perangkat jaringan induk	Terhentinya operasional layanan pemerintah dan publik serta menurunnya kepercayaan masyarakat.
	Gangguan operasional pada jaringan integrasi Kab/Kota	12	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	- Terdapat gangguan perangkat jaringan Metro Kab/Kota - Terdapat gangguan pada jaringan penyedia Metro	Gangguan pada jaringan metro menyebabkan kabupaten/kota tidak dapat mengakses layanan publik digital miliknya yang ditempatkan di data center provinsi
	Rekomendasi teknis pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	12	Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Digital	- Penerapan Arsitektur SPBE belum dipahami secara menyeluruh - Belum tersedia panduan teknis yang lengkap dan terstandardisasi	- Terjadinya duplikasi aplikasi dan inefisiensi sumber daya TI - Ketidakterpaduan data dan layanan antar aplikasi pemerintah - Penurunan nilai maturitas SPBE bidang aplikasi dan arsitektur
	Rendahnya persentase aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi dengan sistem lain	12	Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Digital	- Kurang/tidak meratanya tim teknis dan anggaran integrasi di OPD - Tidak adanya standar integrasi dan interoperabilitas yang dipatuhi	- Data antar aplikasi tidak sinkron dan sulit dimanfaatkan bersama - Efisiensi layanan digital menurun - Menghambat terwujudnya ekosistem pemerintahan digital terpadu

	Kegagalan terhadap pelindungan data pribadi pengguna layanan pemerintah provinsi jawa tengah	10	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber	Perangkat daerah belum menerapkan kaedah PDP pada Sistem elektronik	- ketidakpatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi; - Sanksi hukum berdasarkan peraturan perundangan
	Risiko keamanan informasi pada sistem elektronik perangkat daerah tidak terpetakan	12	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber	Sistem Elektronik Perangkat Daerah yang belum memenuhi standar SMKI	Penerapan kontrol keamanan tidak sesuai dengan standar keamanan, memungkinkan celah risiko keamanan tidak ditangani dengan baik
	Terjadinya gangguan layanan elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber	Adanya serangan siber pada sistem elektronik pendukung layanan	Layanan elektronik pemerintah provinsi jawa tengah tidak dapat diakses / digunakan;
	Rendahnya persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif mendukung penyebaran informasi publik dapat menghambat efektivitas diseminasi informasi pemerintah daerah kepada masyarakat.	12	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media	•Kurangnya kapasitas dan literasi digital anggota KIM dalam mengelola serta menyebarkan informasi publik. •Koordinasi dan pendampingan yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan KIM. •Rendahnya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan komunikasi publik. •Kurangnya inovasi dan adaptasi media komunikasi sesuai dengan tren digital dan kebutuhan audiens.	• Informasi program dan kebijakan pemerintah daerah tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat. • Berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akibat kurangnya informasi yang akurat. • Potensi meningkatnya disinformasi dan hoaks di masyarakat.

	Isu hoaks dan pemberitaan dengan sentiment negatif semakin menyebar luas	12	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media	1. SKPD Pemprov Jateng belum menindaklanjuti isu dengan sentiment negatif 2. Kesulitan menelusuri informasi hoaks terkait Jateng	Hoaks dan pemberitaan dengan sentiment negatif semakin meluas, menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun
	Kurangnya penyebarluasan informasi hasil pembangunan kepala daerah	12	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media	Kurangnya media komunikasi publik yang digunakan	Masyarakat tidak mengetahui informasi terkait hasil pembangunan
	Menurunnya jumlah permohonan informasi yang terselesaikan sesuai peraturan perundangan	12	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media	- Kurangnya pemahaman petugas pelayanan informasi - Kurangnya komitmen pimpinan badan publik terhadap pentingnya pelayanan informasi publik	- Permohonan informasi tidak terselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; - Informasi publik tidak tersampaikan ke masyarakat - Meningkatnya jumlah sengketa informasi publik
	Data Prioritas tidak memenuhi prinsip Satu Data	16	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	1. Komitmen pemenuhan data data produsen data kurang 2. Pengelolaan data sektoral di perangkat daerah belum optimal	Akses terhadap data prioritas daerah terhambat
	Data Sektoral Daerah kurang berkualitas	16	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	1. Pengelolaan data sektoral di perangkat daerah belum optimal 2. Kompetensi produsen data tentang pengelolaan data kurang 3. Belum adanya sistem monev dari Walidata Daerah terhadap penerapan pengelolaan data sektoral	Pengguna data mengakses data yang kurang berkualitas

D. RencanaTindak Pengendalian

Tabel 4

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan *	Indeks Pemerintah Digital	Rendahnya tingkat kematangan indeks Pemdi	20	-Keterlambatan pemenuhan dokomen Pemdi - Ketidak singkronan dengan SPBE yang sedang berjalan - lemahnya kolaborasi dengan listas OPD - terbatasnya SDM - rendahnya partisipasi pulik - rendahnya keamanan informasi dan privasi - data tidak tersandar	Skor nllai pemdi turun	Menyusun, melaksanakan dan monitoring evaluasi arsitertur dan peta rencana Pemerintah Digital	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Sasaran								
Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK **	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital	Transformasi digital gagal dilakukan	16	-Integrasi yang rumit dikarenakan tidak ada standar yang seragam dapat menyebabkan setiap lembaga pemerintahan membangun sistemnya sendiri, sehingga mempersulit integrasi data dan layanan antar-instansi -Keamanan data yang rentan	-Pengambilan keputusan yang tidak akurat -Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola layanan publik	Mensinergikan pemanfaatan infrastruktur TIK dengan pada stakeholder, baik dari OPD maupun pemerintah Kabupaten/Kota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan Sistematis **	Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Menurunnya nilai keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah	16	Masih adanya ego sektoral dalam pemenuhan instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Menurunnya kategori keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah	Meningkatkan implementasi regulasi tata kelola data	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Tujuan								
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital *	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Rendahnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis	16	Standar pelayanan tidak dilaksanakan dengan optimal	Penurunan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi atas implementasi RB untuk dilaksanakan oleh semua unit kerja	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Sasaran								
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **	Indeks Kepuasan Masyarkat Perangkat Daerah	Keterlambatan Respon dan Tanggapan terhadap permintaan Pelayanan Publik	12	-SOP tidak dijalankan dengan baik '-Kurangnya sosialisasi layanan Diskomidigi	Waktu pelayanan menjadi lebih lama	menyusun dan berkomitmrn terhadap pelaksanan standar Operasi Prosedut (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **	Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah tidak berkualitas dan hanya sebatas pemenuhan dokumen	12	Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam menerapkan pengelolaan risiko	Perencanaan Kegiatan Perangkat daerah kurang baikkarena tidak menerapkan pengelolaan risiko	Melaksanakan FGD dan brainstroming saat penyusunan Risk Register	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM di Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok fungsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Sejalan dengan telah dilantiknya Kepala Daerah pada tanggal 20 Februari 2025 dan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 serta dimulainya tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 000.7/0001565 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, tentu perlu dilakukan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029.

Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah disusun agar selaras dengan Kebijakan di Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab./Kota, serta seluruh pemangku kepentingan yang bersinggungan dengan Koperasi, UMKM, serta Kewirausahaan di Provinsi Jawa Tengah. Dokumen RENSTRA berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka akselerasi upaya pembangunan sektor Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah untuk mewujudkan ” **Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045**”, sekaligus sebagai bentuk implementasi berbagai peraturan perundang – undangan terkait Koperasi dan UMKM.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJDPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2820 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025 – 2029;
15. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.2/0002764 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah memberikan arah dan pedoman pembangunan Koperasi dan UKM Jawa Tengah bagi para pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, akademisi, swasta, pendamping/konsultan, Koperasi dan UKM, serta masyarakat agar lebih efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi pembangunan sektor Koperasi dan UKM Jawa Tengah sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah.
2. Memudahkan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan organisasi melalui program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dalam program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun pada tahun 2025 – 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah ini sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0001565 tanggal 26 Februari 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Adapun sistematika Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan
   Bab ini menjabarkan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
b. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
   Bab ini menjabarkan mengenai Gambaran Pelayanan, rumusan permasalahan, serta isu strategis terkait sektor Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah pada RPJMD Tahun 2025 – 2029.
c. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
   Bab ini menjabarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang dijabarkan menggunakan Strategi dan Arah Kebijakan.
d. Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
   Bab ini menjabarkan mengenai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng serta Kinerja Penyelenggaraan yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
e. Bab V Penutup
   Bab ini menjabarkan mengenai kesimpulan dan rekomendasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah ini.
f. Lampiran
   Pada bagian ini terdapat lampiran pendukung atas dokumen Renstra yang terdiri atas Pohon Kinerja, *Cascading*, serta Manajemen Risiko.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

Atas dasar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2021 Bab II tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2021, susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas membawahi :
   a. Sekretariat;
   b. Bidang Kelembagaan;
   c. Bidang Pengawasan;
   d. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran;
   e. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan;
   f. UPT Dinas; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dari penjelasan diatas, dapat diuraikan tugas dan fungsi masing bagian sebagai berikut :

A. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
2. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :
   a) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
   b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
   c) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
   d) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
   e) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
   f) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
   g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
   h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri atas :
   a) Subbagian Progam yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
   b) Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
   c) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di umum dan kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

B. Bidang Kelembagaan.

1. Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi dan tatalaksana.
2. Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
   a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi;
   b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tatalaksana; dan
   c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kelembagaan terdiri atas :
   a) Sub Koordinator organisasi yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator.
   b) Sub Koordinator Tata Laksana yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang tata laksana, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator.

C. Bidang Pengawasan.

1. Bidang Pengawasan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penilaian kesehatan.
2. Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
   a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
   b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kesehatan; dan
   c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengawasan terdiri atas :
   a) Sub Koordinator Pengawasan yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator.
   b) Sub Koordinator Penilaian Kesehatan yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator.

D. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran.

1. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan pemasaran.
2. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:
   a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi;
   b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran; dan
   c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran terdiri atas:
   a) Sub Koordinator Produksi yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator.
   b) Sub Koordinator Pemasaran yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator.

E. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan.

1. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha dan pembiayaan.
2. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:
   a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha;
   b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan; dan
   c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan terdiri atas :
   a) Sub Koordinator Restrukturisasi Usaha yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator.
   b) Sub Koordinator Pembiayaan yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator.

F. UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, terdapat UPT Balai Pelatihan Koperasi UKM yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan Koperasi, usaha kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, UPT Balatkop UKM menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengkajian, pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan.
b) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengkajian, pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan.
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha
3. Sub Koordinator Pengkajian dan Pengembangan
4. Sub Koordinator Penyelenggara
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelatihan Koperasi UKM.

Dari penjelasan diatas dapat diuraikan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1) Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
3) Sub Koordinator Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan pelatihan Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
4) Sub Koordinator Penyelenggara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Sub Koordinator dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
7) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
8) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
9) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah ditampilkan dalam gambar 2.1 berikut :

GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

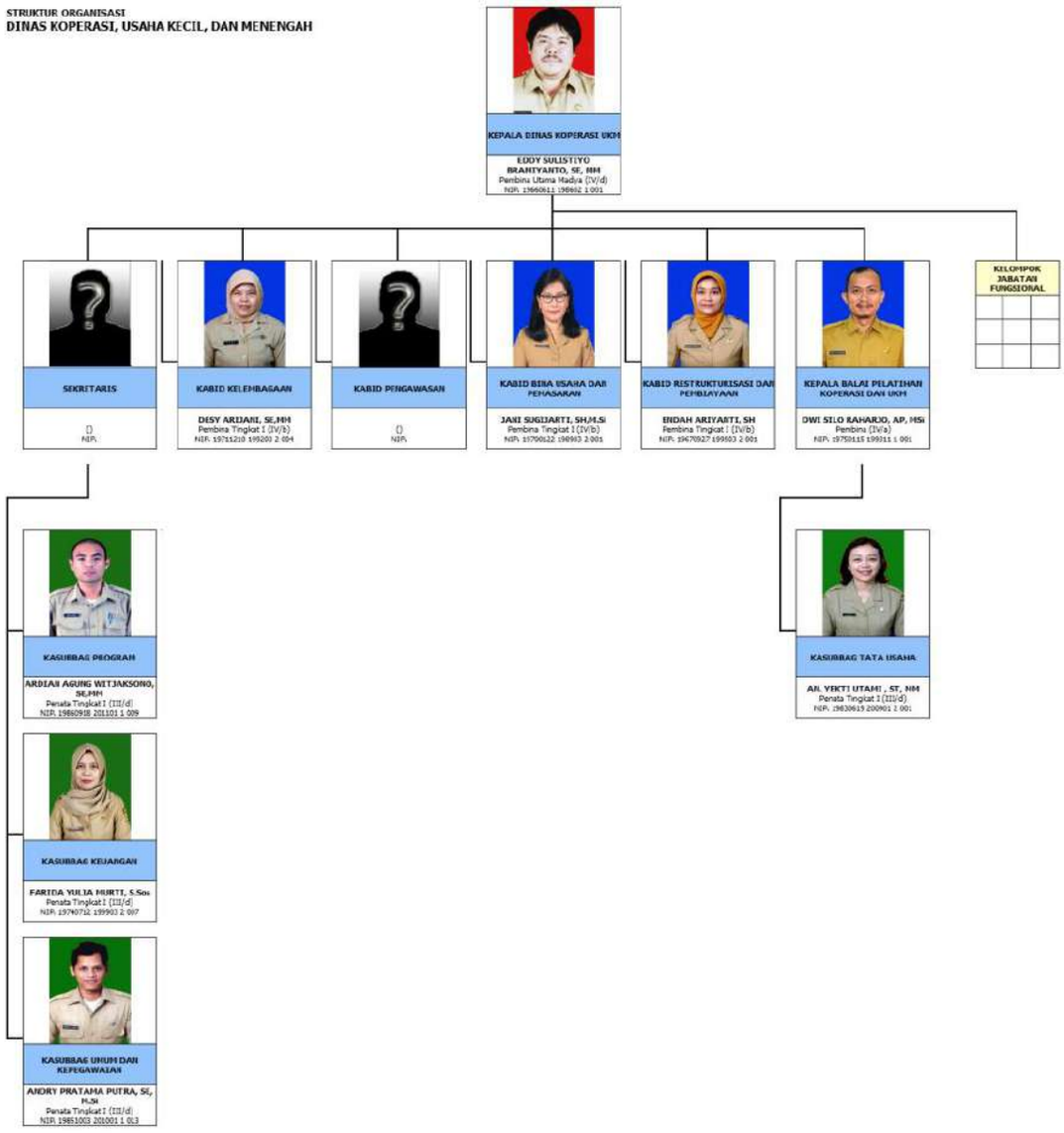

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.1 Sumber Daya Pegawai

Jumlah pegawai/personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah (per 31 Agustus 2025) sebanyak 161 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Non ASN. Adapun rincian pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- PNS : 77 Orang.
- PPPK : 11 Orang.
- Pegawai Non ASN : 73 Orang.

Tabel 2.1
Kekuatan Personil ASN Menurut Golongan

BIDANG	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		GOL V (PPPK)		GOL VII (PPPK)		GOL IX (PPPK)		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Sekretariat	0	0	4	1	9	8	2	0	0	0	1	0	1	1	27
Kelembagaan	0	0	1	0	2	3	0	2	0	0	0	0	2	0	10
Pengawasan	0	0	0	0	7	4	0	3	0	0	0	0	1	0	15
Bina Usaha dan Pemasaran	0	0	1	0	1	3	3	1	0	0	0	0	1	1	11
Restrukturisasi dan Pembiayaan	0	0	0	0	4	2	1	1	0	0	0	0	0	1	9
Balatkop dan UKM	0	0	2	0	6	2	1	3	1	0	0	0	0	1	16
JUMLAH	**0**	**0**	**8**	**1**	**29**	**22**	**7**	**10**	**1**	**0**	**1**	**0**	**5**	**4**	**88**

Tabel 2.2
Kekuatan Personil ASN Menurut Pendidikan

BIDANG	SMA		DIII		DIV		S1		S2		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Sekretariat	3	0	3	0	1	1	5	9	5	0	27
Kelembagaan	1	0	0	0	0	0	3	3	1	3	11
Pengawasan	0	0	0	0	0	0	6	4	2	2	14
Bina Usaha dan Pemasaran	1	0	0	0	0	2	2	2	3	1	11
Restrukturisasi dan Pembiayaan	0	0	0	0	1	0	1	4	3	0	9
Balatkop dan UKM	4	0	0	0	0	0	4	3	2	3	16
JUMLAH	**9**	**0**	**3**	**0**	**2**	**3**	**21**	**25**	**16**	**9**	**88**

Tabel 2.3
Kekuatan Personil Non ASN Menurut Pendidikan

BIDANG	SD		SMA		DIII		DIV		S1		S2		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Sekretariat	1	0	0						6	4			11
Kelembagaan	0	0	1					1	5	2			9
Pengawasan	0	0	1						2	2			5
Bina Usaha dan Pemasaran	0	0	1			2			2	1			6
Restrukturisasi dan Pembiayaan	0	0							8	7	2	1	18
Balatkop dan UKM	0	0	1		3				11	6	1	2	24
JUMLAH	**1**	**0**	**4**	**0**	**3**	**2**	**0**	**1**	**34**	**22**	**3**	**3**	**73**

Tabel 2.4
Pejabat Struktural

ESSELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
JPT	1	-	1
ADMINISTRATOR	1	3	4
PENGAWAS	2	2	4
JUMLAH			**9**

2.1.2 Aset Tetap

Sedangkan untuk aset tetap yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah ditampilkan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Tanah dan Gedung Yang Dimiliki

NO	URAIAN	LUAS
1	Tanah 8 (delapan) bidang terdiri dari a. Tanah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	3.186 M^2
	b. Tanah UPTD Balatkop 1	5.500 M^2
	c. Tanah UPTD Balatkop 2	2.320 M^2
	d. Tanah UMKM Center	2.439 M^2
	e. Tanah PLUT KUMKM di Ds Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas	927 M^2
	f. Tanah di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas	203 M^2
	g. Tanah di Kel. Purwodinatan Kec. Jebres Surakarta	2261 M^2
	h. Tanah di Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur	21.020 M^2
2	Bangunan Gedung terdiri dari a. Bangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	3.243 M^2
	b. Bangunan Balatkop	3.367 M^2
	c. Bangunan UMKM Center	2.617 M^2
	d. Bangunan PLUT KUMKM di Ds. Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas	654 M^2
	e. Bangunan di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas	120 M^2
	f. Bangunan Heterospace Kota Surakarta	2.021 M^2
	g. Bangunan Heterospace Kab. Banyumas	902 M^2
	h. Bangunan Garasi di area Heterospace Kab. Banyumas	112 M^2
	i. Bangunan Garasi Truk di area Heterospace Kab. Banyumas	85 M^2
	j. Bangunan Mushola di area Heterospace Kab. Banyumas	43 M^2
	k. Bangunan Pos Satpam di area Heterospace Kab. Banyumas	16 M^2

2.1.3 Aset Bergerak

Untuk aset bergerak pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah ditampilkan dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 15 (lima belas) unit terdiri dari : a. Honda Civic 1.8 MT Tahun 2008 (H 9500 AR)	1 unit
	b. Toyota Innova E AT Tahun 2014 (H 9507 AR)	1 unit
	c. Toyota Kijang LGX Tahun 2004 (H 9504 VR)	1 unit
	d. Toyota Innova G Diesel Tahun 2005 (H 1461 XG)	1 unit
	e. Toyota Avanza 1300 G Tahun 2010 (H 1036 XG)	1 unit
	f. Toyota Avanza 1300 G Tahun 2010 (H 1038 XG)	1 unit
	g. Toyota Innova Tahun 2011 (H 1590 XG)	1 unit
	h. Toyota Innova Tahun 2011 (H 1589 XG)	1 unit
	i. Toyota Innova Tahun 2011 (H 1587 XG)	1 unit
	j. Toyota Innova Tahun 2011 (H 1588 XG)	1 unit
	k. Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 (H 9529 ZR)	1 unit
	l. Suzuki APV 1500 GL Tahun 2014 (H 9525 FZ)	1 unit
	m. Pick up Tahun 2015 (H 8102 XG)	1 unit
	n. Kijang Innova 2.0G Tahun 2016 (H 1046 ZA)	1 unit
	o. Kijang Innova Zenix G Tahun 2022 (H 50)	1 unit
2	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 8 (delapan) unit	8 unit

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pemberdayaan sektor Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah selama tahun 2020 – 2024 mengalami tren meningkat. Dari sisi Koperasi, terjadi peningkatan jumlah Koperasi dari Tahun 2020 dengan jumlah 19.447 menjadi 21.624 meningkat sebesar 11,19 % di Tahun 2024. Jumlah tersebut di tahun 2024 terbagi atas Koperasi Aktif 9.886 (45,72 %) dan Koperasi Tidak Aktif 11.738 (54,28 %). Adapun rincian perkembangan tersebut disajikan dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Perkembangan Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif, dan Koperasi Tidak Aktif (Unit)

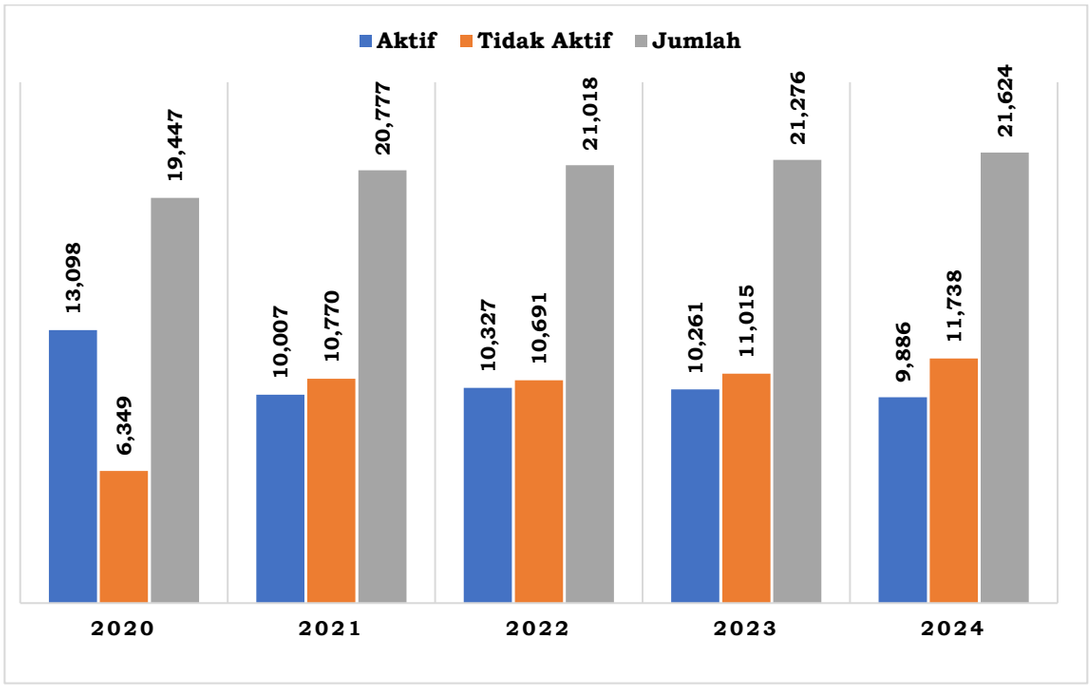

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

Meski mengalami peningkatan Jumlah Koperasi, terdapat perubahan Jumlah Anggota Koperasi secara fluktuatif. Pada Tahun 2020 Jumlah Anggota Koperasi sebesar 8.203.298 orang dan turun hingga Tahun 2023 menjadi 6.171.275 orang. Adapun pada Tahun 2024 terdapat peningkatan menjadi 6.616.831 orang, yang terbagi atas Laki – laki sebesar 3.178.139 orang dan Perempuan sebesar 3.438.692 orang. Gambar 2.3. menyajikan perubahan jumlah anggota Koperasi di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.3.
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi (Orang)

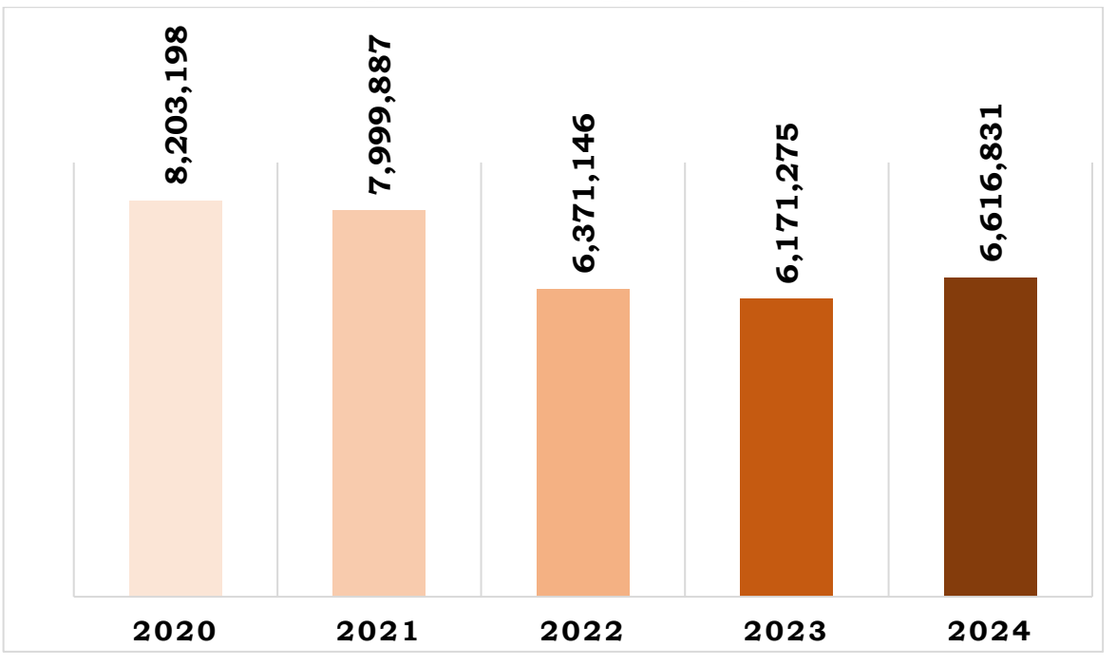

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

Fluktuasi jumlah Koperasi ini juga berdampak kepada penyerapan tenaga kerja. Di tahun 2020 Jumlah Tenaga Kerja Koperasi berjumlah 191.627 orang dan turun hingga tahun 2022 menjadi 104.772. Jumlah tersebut mulai mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 105.614 orang dan pada tahun 2024 menjadi 108.049. Berikut disajikan perkembangan penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi pada gambar 2.4.

Gambar 2.4.
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Koperasi

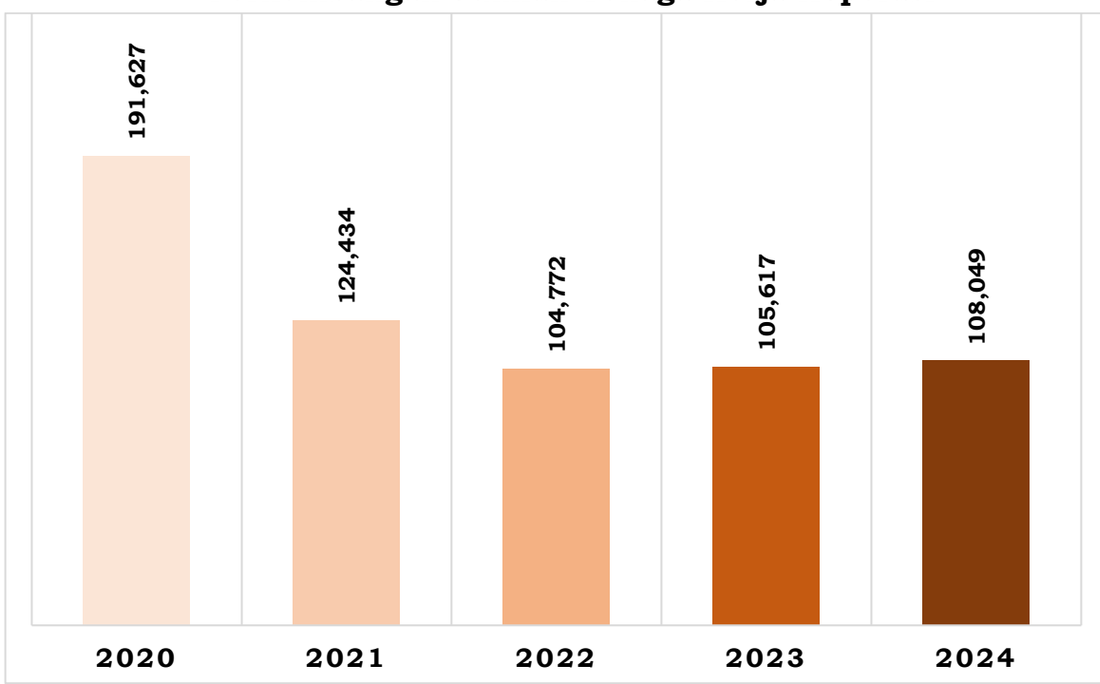

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

Adanya pandemi *COVID-19* berdampak pula terhadap kinerja Koperasi. Jumlah Aset pada tahun 2020 sebesar Rp 72.427 milyard dan Volume Usaha Rp 73.881 milyard. Perkembangan Aset dan Omzet Koperasi terus berfluktuasi hingga pada Tahun 2024 tercatat Jumlah Aset sebesar Rp 59.463 milyard dan Volume Usaha sebesar Rp 57.962 milyard. Gambar 2.5. menyajikan perkembangan omzet dan aset Koperasi di Jawa Tengah.

Gambar 2.5.
Perkembangan Aset dan Volume Usaha Koperasi

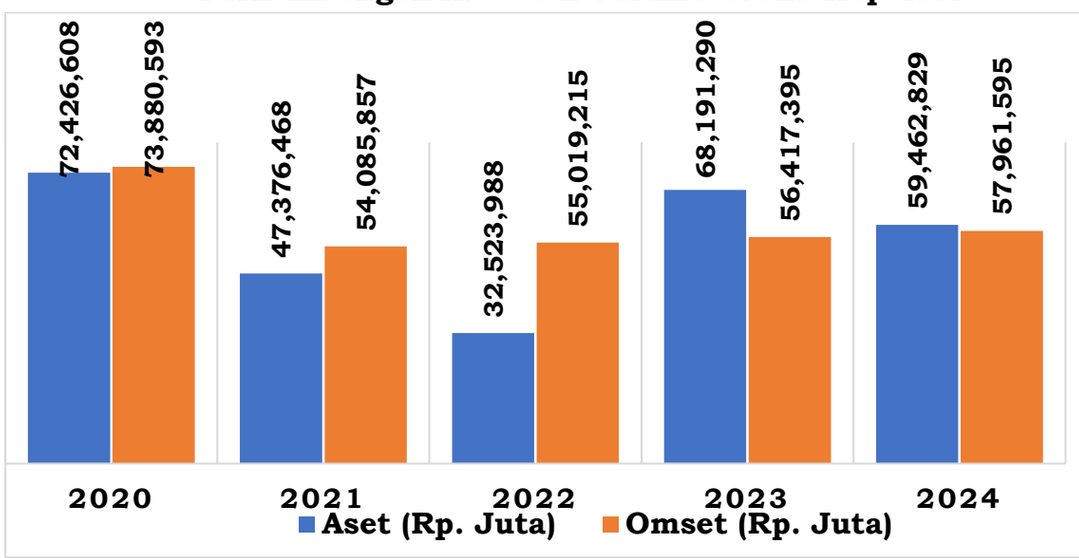

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

Jika melihat perkembangan UMKM binaan, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2018 sendiri berjumlah 143.738 unit, lalu meningkat hingga tahun 2022 sebesar 25,63% menjadi 180.579 unit. Di tahun 2020 Jumlah UMKM Binaan sebesar 167.391 unit dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 193.200 unit. Gambar 2.6. menyajikan perkembangan jumlah UMKM Binaan di Jawa Tengah.

Gambar 2.6.
Perkembangan UMKM Binaan (Unit)

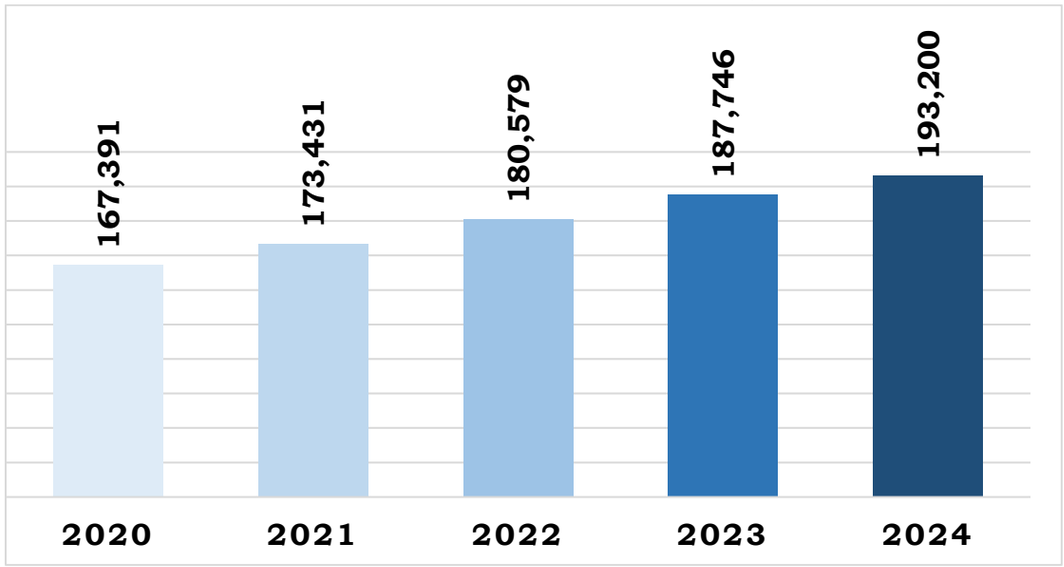

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

Dengan meningkatnya Jumlah UMKM binaan, berdampak pula terhadap perkembangan aset dan omzet UMKM binaan. Pada tahun 2020, jumlah aset sebesar Rp 38.353 milyard dan omzet sebesar Rp 67.087 milyard. Jumlah tersebut terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi jumlah aset sebesar Rp 39.506 milyard dan omzet sebesar Rp 69.774 milyard. Gambar 2.7 menampilkan perkembangan aset dan omzet UMKM Binaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.7.
Perkembangan Aset dan Omzet UMKM Binaan

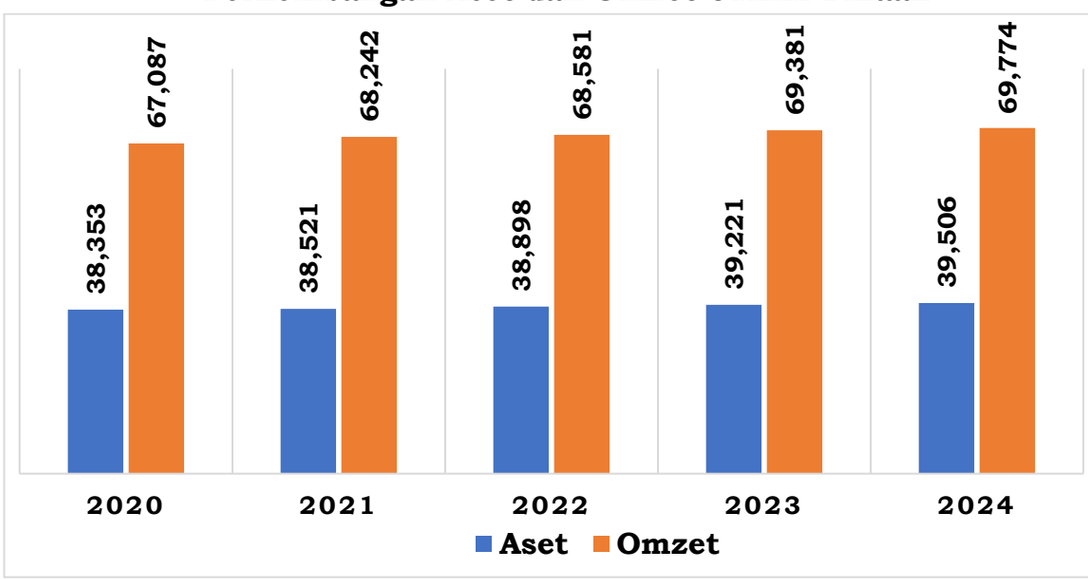

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

Untuk penyerapan tenaga kerja UMKM binaan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2020, nilai penyerapan tenaga kerja sebesar 1.298.007 orang, kemudian meningkat tahun 2024 menjadi 1.367.433 orang. Gambar 2.9. menyajikan perkembangan penyerapan tenaga kerja UMKM Binaan di Jawa Tengah. Gambar 2.8 menampilkan perkembangan penyerapan tenaga kerja UMKM Binaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.8.
Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Binaan

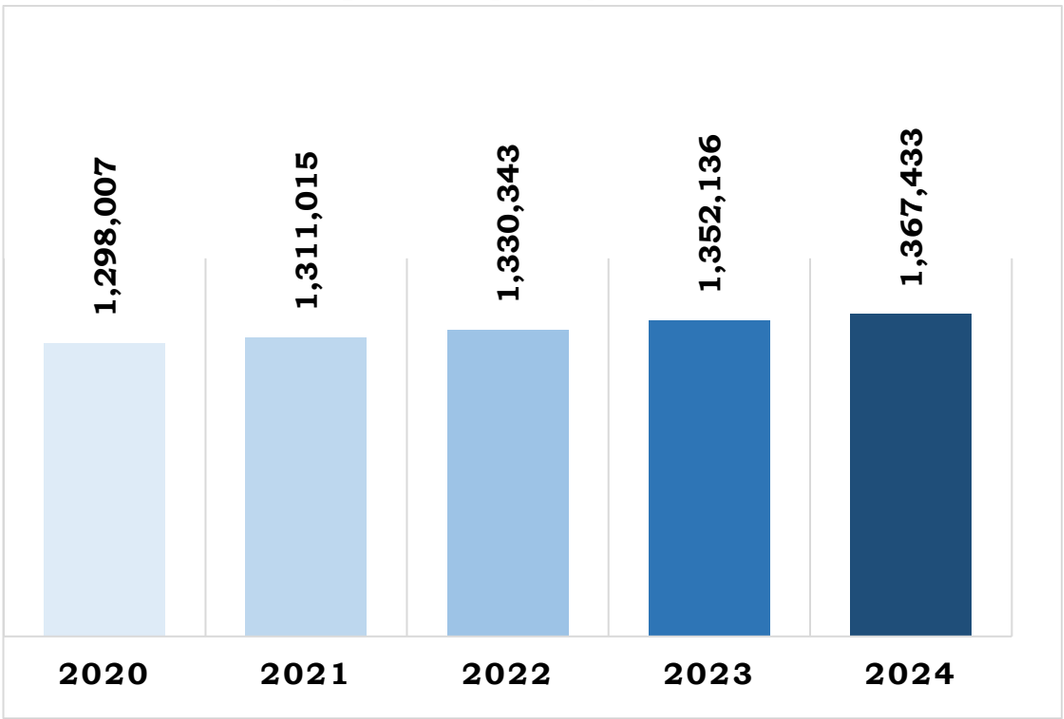

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

2.4 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 – 2026, Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah diukur dari 1 (satu) indikator tujuan, 2 (dua) indikator sasaran. Berikut gambaran kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 – 2024 diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018 - 2023**																			
1	Tujuan PD																			
	Persentase Kontribusi Koperasi dan UKM Terhadap PDRB Jawa Tengah	%	-	-	-	5,04	4,95	4,96	5,64		11,17	37,41	9,14	6,81		211,57	755,76	184,27	120,74	
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%	-	-	-	80	79,00	84,00	86,00		88,25	82,00	87,00	86,75		110,31	103,80	103,57	100,87	
2	Sasaran PD																			
	Persentase Pertumbuhan Omzet KUKM di Jawa Tengah	%	-	-	-	21,08	23,68	9,88	29,68		-2,58	17,42	9,94	29,91		-12,24	73,56	100,61	101	
	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUKM di Jateng	%	-	-	-	22,80	25,30	21,10	29,95		-2,79	28,80	21,19	30,26		-12,24	110,99	100,43	101,04	
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%	-	-	-	80	79,00	84,00	86,00		88,25	82,00	87,00	86,75		110,31	103,80	103,57	100,87	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	-	-	-	76,31	76,71	77,11	77,51		74,69	76,95	79,36	82,65		97,88	100,31	102,92	106,63	
3	Program PD																			
	Persentase Koperasi Aktif	%	-	-	-	84,52	65	66	85,19		71,27	72,96	77,56	85,41		84,32	112,25	117,52	100,26	
	Persentase Koperasi Provinsi Sehat	%	-	-	-	23,41	22	23,50	27,15		23,44	13,06	23,73	27,18		100,13	59,36	100,98	100,11	
	Persentase Pertumbuhan Anggota Koperasi Provinsi	%	-	-	-	42,95	2,5				2,32	2,68				5,40	107,20			
	Persentase Koperasi Provinsi Berkualitas	%	-	-	-	73,50	54				47,50	94				64,63	174,07			
	Persentase SDM KUKM yang Terampil	%	-	-	-	78,00	80				98,79	99,13				126,65	123,91			
	Persentase Koperasi Provinsi dan UKM Binaan yang Mengakses Kredit Perbankan/Non Bank	%	-	-	-	31,55	27,85				27,21	31,61				86,24	113,50			
	Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi Provinsi dan UKM yang Dibina	%	-	-	-	74,33	6,88				-5,96	0,22				-8,02	3,29			
	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Koperasi Provinsi yang Dibina	%	-	-	-	55,88	1,22				-2,78	1,28				-4,97	104,92			
	Persentase Pertumbuhan Profit Koperasi dan UKM	%	-	-	-	23,02	8,73				-4,18	7,81				-18,16	89,46			

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	yang Dibina																			
	Persentase Pertumbuhan Pangsa Pasar Produk KUKM	%	-	-	-	5,95	3,84				-8,04	-6,72				-135,13	-175,00			
	Persentase Koperasi Provinsi yang Berkualitas	%	-	-	-			18	76,50				35,59	25,13				197,72	32,85	
	Persentase SDM KUKM yang Terampil	%	-	-	-			82	83				99,26	99,53				121,05	119,92	
	Persentase Usaha Mikro Menuju Kecil	%	-	-	-			12,59	12,77				31,45	12,78				249,80	100,08	
	Persentase Usaha Kecil Menuju Menengah	%	-	-	-			23	25				30,97	39,10				134,65	156,40	
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	-	-	-	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (UPTD)	%	-	-	-	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
B	**Renstra PD Tahun 2024 - 2026**																			
1	Tujuan PD																			
	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	-	-	-					12,53					14,90					118,91
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	-	-	-					83,00					83,13					100,16
2	Sasaran PD																			
	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	-	-	-					7,16					7,21					100,70
	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat Jawa Tengah	%	-	-	-					0,29					0,94					324,14
	Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	-	-					3					3,17					105,67
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-					89					90,75					101,97
3	Program PD																			
	Persentase koperasi berkualitas	%	-	-	-					25,02					31,45					125,70
	Persentase koperasi	%	-	-	-					48,09					53,21					110,65

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	provinsi produktif																			
	Persentase UMKM siap bermitra	%	-	-	-					21,06					21,37					101,47
	Persentase usaha mikro mandiri	%	-	-	-					81,20					81,22					100,02
	Persentase SDM koperasi yang berkualitas	%	-	-	-					10					20,74					207,40
	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	-	-	-					23					80,43					349,70
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	-	-	-					100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	-	-	-					100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (UPTD)	%	-	-	-					100					100					100

Mengacu pada tabel 2.6, dapat disimpulkan di mana hingga akhir Tahun 2024 semua indikator baik Tujuan dan Sasaran telah melebihi target. Capaian tersebut didukung oleh partisipasi aktif Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah, peran serta seluruh pemangku kepentingan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sehingga kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah dapat terlaksana dengan optimal.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 – 2024 juga digambarkan melalui anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan. Untuk tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD (Rp 000)					APBD pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Tahun / Sampai Dengan Tahun (Rp 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun / Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan						479.413	890.570	402.054	550.000	601.225	507.553	914.920	440.963	573.707	686.955	105,87	102,73	109,68	104,31	114,26	19,25	19,58
2	Belanja	65.750.000.000	72.656.000.000	81.676.000.000	87.223.000.000	77.649.400.077	59.523.098.000	50.116.411.000	60.398.674.000	74.512.305.000	62.459.935.000	57.651.493.400	44.329.196.000	59.182.439.400	70.876.122.000	61.107.686.000	96,86	88,45	97,99	95,12	97,83	2,98	4,09

Berdasarkan data dari tabel 2.7 dapat disimpulkan bahwa untuk alokasi anggaran pemberdayaan Koperasi dan UKM di Jawa tengah selama periode 2020 - 2024 sudah cukup baik, walaupun pada tahun 2020 mengalami kendala rasionalisasi anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19* dan pada saat tersebut Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah mendapat anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pemulihan ekonomi sektor koperasi dan UKM dengan pembuatan masker di mana beberapa UKM diberdayakan untuk membuat masker guna pencukupan *stock* masker pada saat itu, dan pemberian bahan baku bagi UKM pangan supaya tetap dapat berproduksi saat di tengah kelangkaan bahan baku pada masa pandemi *COVID-19.*

Di sisi lain untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 banyak yang tidak bisa terlaksana akibat rasionalisasi anggaran, sehingga hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi dalam pengembangan sektor koperasi dan UKM di Jawa Tengah. Di Tahun 2021 dan 2022, kinerja pemberdayaan Koperasi dan UMKM berangsur membaik. Peningkatan pagu anggaran tersebut menjadi bagian dalam mengoptimalkan adaptasi sektor Koperasi dan UMKM dalam memulihkan usaha serta beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi.

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan hasil pembahasan bersama stakeholder terkait (Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kab/Kota se-Jawa Tengah, Bappeda Kab/Kota Provinsi/se-Jawa Tengah, Asosiasi Dunia Usaha, Asosiasi Profesi, Gerakan Koperasi dan UKM, dan Perguruan Tinggi) berikut daftar inventarisasi permasalahan sektor Koperasi dan UKM :

Tabel. 2.8
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kontribusi Koperasi dan UKM dalam perekonomian daerah	Rendahnya kontribusi Koperasi terhadap perekonomian daerah	Masih banyak Koperasi yang perlu diperiksa dan diawasi
			Masih banyak Pengurus dan Pengawas Koperasi yang belum layak dan patuh
			Rendahnya Kualitas kelembagaan dan tata kelola Koperasi
			Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Dan Hasil Riset dalam Aktivitas Usaha Koperasi serta UMKM
			Banyaknya Koperasi yang Belum Mengimplementasikan penerapan standar akuntasi keuangan - entitas privat
			Banyak Koperasi yang Terkendala Akses Pembiayaan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Dan Hasil Riset dalam Aktivitas Usaha Koperasi
			Rendahnya Akses Kemitraan Koperasi
			Rendahnya Kualitas SDM Koperasi
		Rendahnya minat berwirausaha di Jawa Tengah	Rendahnya Kualitas dan Kompetensi SDM UMKM
			Lambatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru
			Lambatnya Pertumbuhan Wirausaha Digital dan Penumbuhan Komunitas Wirausaha Baru/Digital
			Belum Adanya Basis Data yang *Realtime*
			Masih Banyak UMKM yang Produknya Belum Terstandarisasi dan Tersertifikasi
			Perlunya Layanan Pendampingan dalam Mengelola Usaha
			Masih Banyak UMKM yang Terkendala Literasi
		Rendahnya perkembangan UMKM Non Pertanian di Jawa Tengah	Produk UMKM yang Kurang Inovatif
			Rendahnya Akses Pemasaran UMKM
			Rendahnya Akses Kemitraan UMKM
			Rendahnya Literasi Hukum UMKM

2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi dan UKM di Jawa Tengah memiliki potensi atau tantangan yang akan dihadapi oleh perangkat daerah ke depan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah memperhatikan lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang mempengaruhi perangkat daerah langsung maupun tidak langsung. Rumusan isu strategis disajikan dalam tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangakat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan; 2. Penurunan tingkat kemiskinan; 3. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia; 4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.	1. Perbedaan definisi UMKM antar lembaga serta proses integrasi data masih berjalan dengan lambat; 2. Rendahnya kontribusi UMKM terhadap PDRB; 3. Rendahnya UMKM yang masuk ke dalam kemitraan termasuk berjejaring dalam ranta nilai global/nasional; 4. Rendahnya akses pembiayaan UMKM; 5. Rendahnya pemanfaatan teknologi termasuk digitalisasi dalam aktivitas usahanya; 6. Struktur UMKM yang mayoritas berskala mikro dan bersifat informal serta melakukan usaha hanya utk kebutuhan sehari – hari; 7. Kelembagaan dan tata kelola Koperasi yang belum sesuai jatidiri dan prinsip perkoperasian; 8. Kurangnya profesionalisme SDM Pengurus/Pengawas; 9. Kurangnya regenerasi pengurus;	1. Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2. Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi masih relatif rendah; 3. Ketimpangan akses dalam peningkatan kualitas hidup Sumber Daya Manusia; 4. Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif; 5. Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim; 6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	1. Kemiskinan; 2. Pertumbuhan Eknomi dan Kesempatan Kerja; 3. Produksi dan Konsumsi berkelanjutan; 4. Kemitraan Global.	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi; 2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; 3. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan	1. Ekonomi; 2. Politik dan tata pemerintahan; 3. Sarpras; 4. Sumber daya alam dan linkungan hidup.	1. Peningkatan proporsi UKM terhadap jumlah usaha; 2. Peningkatan rasio kewirausahaan; 3. Peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangakat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	10. Keterbatasan akses modal dan nilai tambah produk; 11. Citra Koperasi yang kurang baik; 12. Mayoritas Koperasi berskala usaha mikro.	dan berbasis teknologi informasi.		pelayanan publik yang berkualitas; 4. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh; 5. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2025 – 2029 merupakan tujuan dan sasaran pembangunan sektor Koperasi dan UKM di Jawa Tengah. Tujuan dan sasaran tersebut disertai dengan indikator kinerja dan targetnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan Koperasi dan UKM periode tahun 2025 – 2029 adalah :

1. "Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB". Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki Koperasi dan UKM Jawa Tengah. Rumusan tujuan, indikator dan targetnya dapat dilihat pada tabel 3.1.
2. "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis". Tujuan tersebut sebagai penunjang kesekretariatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui tata kelola perangkat daerah yang berintegritas dan dinamis. Rumusan tujuan, indikator dan targetnya dapat dilihat pada tabel 3.2.

B. Sasaran Perangkat Daerah

1. Sasaran pembangunan Koperasi dan UKM periode tahun 2025 – 2029 adalah :
   a. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB.

      Sasaran ini sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mengukur peningkatan Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.

   b. Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi.

      Sasaran ini sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mengukur Peningkatan UKM Non Pertanian pada Level Provinsi.

   c. Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Jawa Tengah

      Sasaran ini sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mengukur Jumlah Wirausaha di Jawa Tengah melalui Peningkatan Rasio Kewirausahaan Daerah.

      Sasaran tersebut merupakan hasil yang diharapkan untuk menjawab isu – isu strategis pemberdayaan Koperasi dan UKM Jawa Tengah. Rumusan sasaran, indikator dan targetnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

2. Sasaran Kesekretariatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 adalah :

a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah.

Sasaran ini menggambarkan implementasi pengelolaan risiko pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jateng yang didapatkan dari hasil penilaian APIP Provinsi Jawa Tengah.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.

Sasaran ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, yang didapatkan dari survei kepuasan masyarakat.

Sasaran tersebut merupakan hasil yang diharapkan untuk meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah. Rumusan sasaran, indikator dan targetnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB		Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	6,81	14,90	12,99	13,52	13,68	13,87	14,08	14,23	14,23
	1. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	-	-	2,00	2,16	2,34	2,53	2,74	2,88	2,88
	2. Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	-	-	10,39	10,49	10,59	10,71	10,82	10,91	10,91
	3. Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Jawa Tengah	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	-	-	3,21	3,53	3,85	4,23	4,77	5,05	5,05

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kesekretariatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	-	83,13	71	71,50	72	72,50	73	73,50	73,50
	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	-	3,17	3,10	3,12	3,14	3,16	3,18	3,20	3,20
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	86,75	90,75	78	78,60	79	79,60	80	80,60	80,60

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Strategi merupakan rangkaian tahapan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah. Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk menjawab permasalahan pemberdayaan Koperasi dan UKM serta responsif terhadap pemberdayaan masyarakat rentan dan kesetaraan gender.

Penyusunan strategi dan arah kebijakan tersebut telah mengacu pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan strategi dan arah kebijakan atas tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	*Sasaran 1.1*	*Strategi 1.1.1*	*Arah Kebijakan 1.1.1.1*
Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	Meningkatnya volume usaha Koperasi terhadap PDRB	Peningkatan jumlah Koperasi yang diawasi	Peningkatan kualitas satgas pengawas Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.1.2
			Penilaian kesehatan mandiri bagi Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.1.3
			Peningkatan kepatuhan Koperasi
		Arah Kebijakan 1.1.2	*Arah Kebijakan 1.1.2.1*
		Penguatan Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Kualitas kelembagaan dan tata kelola Koperasi
		Strategi 1.1.3	*Arah Kebijakan 1.1.3.1*
		Peningkatan manajemen usaha Koperasi	Pemanfaatan Teknologi Dan Hasil Riset dalam Aktivitas Usaha
			Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			1.1.3.2
			Peningkatan akses pembiayaan Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.3.3
			Pendampingan Manajemen Usaha Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.3.4
			Fasilitasi kemitraan Koperasi
			Arah Kebijakan 1.1.3.5
			Penyusunan Data Potensi Usaha Koperasi Desa
			Arah Kebijakan 1.1.3.6
			Sosialisasi dan Pendampingan dengan Pengurus/Pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
			Arah Kebijakan 1.1.3.7
			Fasilitasi Akses Kerja Sama Hasil Usaha KDMP dengan *Stakeholder*
			Arah Kebijakan 1.1.3.8
			Peningkatan Produktivitas bagi Anggota KDMP
			Arah Kebijakan 1.1.3.9
			Peningkatan Jaringan Pemasaran KDMP
		Strategi 1.1.3	*Arah Kebijakan 1.1.3.1*
		Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan bagi Koperasi	Pelatihan kualitas SDM Koperasi
	Sasaran 1.2	*Strategi 1.2.1*	*Arah Kebijakan*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			1.2.1.1
	Meningkatnya minat berwirausaha	Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan bagi Wirausaha	Fasilitasi penumbuhan wirausaha baru
		Strategi 1.2.2	*Arah Kebijakan 1.2.2.1*
		Pemberdayaan UKM dan wirausaha	Pendampingan UKM dan wirausaha
			Arah Kebijakan 1.2.2.2
			Fasilitasi literasi pembiayaan
			Arah Kebijakan 1.2.2.3
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha
			Arah Kebijakan 1.2.2.4
			Fasilitasi peningkatan daya saing UMKM
		Strategi 1.2.3	*Arah Kebijakan 1.2.3.1*
		Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan bagi UMKM dan wirausaha	Pelatihan bagi UMKM dan wirausaha
	Sasaran 1.3	*Strategi 1.3.1*	*1.3.1.1*
	Meningkatnya UMKM non pertanian	Peningkatan kapasitas produksi dan perluasan akses pemasaran	Fasilitasi peningkatan kapasitas produksi dan akses pemasaran
		Strategi 1.3.2	*Arah Kebijakan 1.3.2.1*
		Peningkatan pemahaman literasi hukum	Fasilitasi pendampingan dan konsultasi hukum
Tujuan 2	*Sasaran 2.1*	*Strategi 2.1.1*	*Arah Kebijakan 2.1.1.1*
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko	Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat	Koordinasi penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Birokrasi di Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	daerah	daerah
	Sasaran 2.2	*Strategi 2.1.1*	*Arah Kebijakan 2.1.1.1*
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah

Dalam rangka mewujudkan strategi dan arah kebijakan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah menentukan pentahapan Renstra pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Dengan dilaksanakannya pentahapan tersebut, pemberdayaan Koperasi dan UKM di Provinsi Jawa Tengah akan lebih terarah mengingat penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) difokuskan pada tema pembangunan tahunan. Pentahapan tersebut mengacu kepada tema pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Adapun garis kebijakan tersebut sebagaimana Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM dalam mendukung Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.	Penguatan kapasitas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekosistem ekonomi syariah.	Pengukuhan peran Koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi berbasis potensi desa dan rantai nilai industri hijau.	Penguatan daya saing Koperasi.	Perwujudan Koperasi dan UMKM yang produktif, mandiri, tangguh, dan berdaya saing.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan setelah ditetapkannya garis kebijakan tahunan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah menyusun rencana aksi tahunan. Rencana aksi tersebut merinci aktivitas riil yang dapat menjawab tantangan pemberdayaan Koperasi dan UKM secara efektif dan efisien dengan menyesuaikan tema pembangunan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Hal ini menjadikan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah memenuhi kriteria SMART, yaitu *Spesific* (jelas dan fokus), *Measurable*

(terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), dan *Time-bound* (berbatas waktu). Adapun rencana aksi tersebut sebagaimana tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Rencana Aksi Perangkat Daerah

NO	AKTIVITAS RIIL	OUTPUT
Tema 2026: Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional		
1.	Pemberdayaan Aspek Produksi Koperasi	Meningkatkan produktivitas Koperasi sektor riil
2.	Penguatan Kapasitas Manajemen Rantai Pasok Koperasi	Membentuk jaringkan rantai pasok Koperasi sektor riil
3.	Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Koperasi	Mengembangkan potensi produk unggulan daerah melalui Koperasi
Tema 2027: Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi		
1.	Penguatan Implementasi Prinsip Syariah bagi KSPPS/USPPS	Menguatkan implementasi prinsip syariah bagi KSPPS / USPPS
2.	Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren sebagai Pendidikan Sosial dan Ekonomi Santri	Memfasilitasi pengembangan Koppontren
3.	Fasilitasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal	Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikat Halal
Tema 2028: Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau		
1.	Peningkatan Kualitas Manajemen Usaha Koperasi	Meningkatkan Kualitas Manajemen Usaha Koperasi bagi Koperasi Desa/Kelurahan
2.	Fasilitasi Akses Pembiayaan Koperasi	Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi
3.	Sosialisasi Pengelolaan Limbah Produk UMKM	Memberi pemahaman bagi pelaku UMKM terkait pengelolaan limbah
Tema 2029: Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan		
1.	Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk UMKM	Memfasilitasi UMKM Dalam mendivesifikasi produk
2.	Peningkatan Kualitas Produk UMKM Disabilitas	Memfasilitasi UMKM Disabilitas dana meningkatkan kualitas produk
3.	Peningkatan Kualitas Kemasan Produk UMKM	Menigkatkan kualitas kemasan produk UMKM
4.	Fasilitasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal	Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikat Halal
Tema 2030: Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan		
1.	Pelatihan Manajerial Koperasi	Meningkatkan Manajerial Koperasi

NO	AKTIVITAS RIIL	OUTPUT
2.	Penguatan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Koperasi	Menguatkan manajemen risiko Koperasi
3.	Fasilitasi Akses Pembiayaan Koperasi	Memfasiliasi akses pembiayaan bagi Koperasi
4.	Penguatan Kapasitas Manajemen Rantai Pasok Koperasi	Membentuk jaringkan rantai pasok Koperasi sektor riil
5.	Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Koperasi	Mengembangkan potensi produk unggulan daerah melalui Koperasi
6.	Fasilitasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal	Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikat Halal
7.	Pelatihan Manajerial UKM	Meningkatkan Manajerial UMKM
8.	Akademi Balatkop	*Shortcourse* secara digital dengan tema sesuai kebutuhan masyarkaat

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mengidentifikasi Manajemen. Untuk level strategis perangkat daerah, dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis sesuai dengan tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB tidak dapat optimal.	12	Munculnya dinamika dalam perekonomian.	Dinamika perekonomian seperti perubahan minat konsumen, keterbasan produksi, dan jaringan pemasaran yang kurang optimal.	Meningkatkan motivasi bagi Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kinerja usaha.	Sekretariat	Tahun 2025 - 2029
Sasaran								
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Terjadi perbedaan pemahaman dalam menghitung Volume Usaha Koperasi	12	Petugas data di Kab./Kota masih belum memahami perhitungan Volume Usaha Koperasi.	Ditetapkannya Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024 memberikan wawasan baru bagi seluruh petugas data dalam menghitung Volume Usaha Koperasi yang selama ini berbeda dan berpotensi bias.	Melakukan sosialisasi serta pendampingan bagi petugas data serta gerakan Koperasi dan memahami perhitungan volume usaha Koperasi, serta meningkatkan kinerja usaha Koperasi di Jawa Tengah.	Sekretariat	Tahun 2025 - 2029
Program								
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	masih banyaknya koperasi yang tidak mematuhi peraturan perkoperasian yang berlaku	15	banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan prinsip dan jatidiri koperasi dalam pengelolaan usahanya	banyaknya koperasi yang tidak dapat memenuhi standar koperasi sehat dan memicu munculnya berbagai permasalahan koperasi.	Mengoptimalkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan koperasi	Pengawasan	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	Rekomendasi pemeriksaan kesehatan yang tidak ditindaklanjuti oleh koperasi	9	Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan koperasi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan koperasi	Beberapa rekomendasi pemeriksaan kesehatan tidak dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh koperasi, sehingga menyebabkan penyimpangan yang terjadi menjadi temuan berulang dan berdampak pada progres peningkatan kualitas kinerja dan kepatuhan koperasi terhadap regulasi yang berlaku.	Mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan Koperasi serta memberikan sosialisasi mengenai kepatuhan Koperasi sesuai regulasi yang berlaku.	Pengawasan	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase koperasi yang telah dilakukan pengawasan	Kebenaran data dukung yang disajikan pengurus/pengelola koperasi	12	Penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai kondisi riil koperasi	Pemeriksaan kesehatan koperasi bertumpu pada informasi yang disampaikan dan data dukung yang disajikan oleh pengurus, apabila terdapat ketidaksesuaian antara hal tersebut dengan kondisi riil koperasi, maka hasil pemeriksaan kesehatan koperasi, termasuk predikat kesehatan yang diperoleh, menjadi tidak akurat.	Mengoptimalkan kinerja penggalian data dan bukti dukung pemeriksaan kesehatan koperasi	Pengawasan	Tahun 2025 - 2029
Program								
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi provinsi produktif	Masih Rendahnya Koperasi Aktif di Jawa Tengah yang Melaksanakan dan Melaporkan RAT	12	Adanya Permasalahan Manajerial dan Keuangan dalam Koperasi	Permasalahan Manajerial dapat berupa Pengurus tidak memahami cara pengelolaan kelembagaan Koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Permasalahan Keuangan dapat berupa Pengurus tidak memahami pengelolaan usaha Koperasi, sehingga Koperasi mengalami penurunan omzet usaha.	Sinergi dengan satgas pengawas Koperasi dalam sosialisasi kepatuhan bagi Koperasi.	Kelembagaan	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase pertumbuhan modal Koperasi	Kurangnya efisien pengelolaan operasional dan manajemen keuangan	9	Kurangnya pemahaman Pengurus/Pengelola Koperasi dalam Manajemen Produksi Usaha Koperasi, sehingga dapat mempengaruhi keuangan dan biaya operasional dalam produksi	Koperasi mengalami penurunan volume usaha produksi	Melakukan pembinaan bagi Koperasi sektor produksi dalam mengembangkan usahanya yang utamanya dalam permodalan koperasi	Kelembagaan	Tahun 2025 - 2029
	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Jumlah Anggota Koperasi Mengalami Penurunan	9	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Perkoperasian	Kurangnya Minat Masyarakat untuk Bergabung dengan Koperasi, Kurangnya Partisipasi Anggota Koperasi.	Memberikan fasilitasi dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha untuk berkoperasi	Kelembagaan	Tahun 2025 - 2029
Program								

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Berkualitas	Rendahnya pemahaman dan pengetahuan Pengelola/Pengurus/Pengawas Koperasi	12	1. Kurangnya kesadaran Koperasi untuk mengikutsertakan Pengelola/Pengurus/Pengawas dalam program pelatihan 2. Peserta tidak mampu menerapkan ilmu yang didapat selama pelatihan	Kinerja Koperasi tidak maksimal yang memuncullkan resiko kesalahan dan pemyelewengan dalam pengelolaan Koperasi serta tingkat kepercayaan Masyarakat kepada Koperasi menurun dengan kurangnya kualitas SDM Koperasi	Memberikan fasilitas program peningkatkan pengetahuan dan Kompetensi SDM Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi melalui pelatihan dengan seleksi dan komitmen dari peserta pelatihan	Balatkop UKM	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya (nilai post test dibandingkan nilai pre test)	Rendahnya jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya pasca pelatihan dan minimnya implementasi materi/ilmu yang didapat pasca pelatihan	9	1. Kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti program Pelatihan 2. Minimnya Minat peserta dalam mengikuti pelatihan 3. Materi, metode pembelajaran dan narasumber yang tidak sesuai	Kinerja Koperasi tidak maksimal karena tidak meningkatnya pengetahuan SDM Pengelola/Pengurus/Pengawas Koperasi pasca pelatihan sehingga menyebabkan menurunya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi serta daya saing Koperasi yang rendah. Tidak efektifnya pola dan hasil pelatihan yang dilaksanakan	Menyelenggarakan pelatihan dengan tema-tema materi yang menarik dalam kerangka program pelatihan : 1. Manajerial Bagi Koperasi 2. Kompetensi Bagi Koperasi 3. Perkoperasian bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Menyiapkan materi, metode pembelajaran dan narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi	Balatkop UKM	Tahun 2025-2029
Sasaran								
Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Jawa Tengah	Rasio Kewirausahaan Daerah	Adanya potensi pertumbuhan kewirausahaan yang menurun.	12	Perkembangan kewirausahaan di Jawa Tengah belum optimal.	Dinamika perekonomian secara global dapat berdampak kepada menurunnya minat masyarakat dalam berwirausaha.	Koordinasi dengan seluruh *stakeholder* untuk memfasilitasi masyarakat yang berminat dalam berwirausaha	Sekretariat	Tahun 2025 - 2029
Program								
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM UMKM yang berkualitas	rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM UMKM	12	1. Kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti program Pelatihan 2. Materi, metode pembelajaran dan narasumber yang belum optimal	kurang optimalnya perkembangan usaha	Optimalisasi pelaksanaan pelatihan melalui penyesuaian materi, metode pembelajaran, dan pemilihan narasumber yang tepat.	Balatkop UKM	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Presentase SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya	rendahnya jumlah SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya	9	rendahnya implementasi materi paska pelatihan	kurang optimalnya perkembangan usaha	Review Materi dan Silabi Pelatihan, pendampingan paska pelatihan	Balatkop UKM	tahun 2025-2029
Program								
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Wirausaha yang berkualitas	rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM UMKM	12	1. Kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti program Pelatihan 2. Metode pembelajaran yang belum optimal	Kurang optimalnya perkembangan usaha	mengoptimalkan pendampingan paska pelatihan	Balatkop UKM	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Presentase SDM Wirausaha yang meningkat pengetahuannya	rendahnya jumlah SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya	12	rendahnya implementasi materi paska pelatihan	kurang optimalnya usaha	Pendampingan dan Sosialisasi oleh konsultan pendamping	Balatkop UKM	tahun 2025-2029
Program								
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	Rendahnya manajemen SDM UMKM	12	Kurangnya profesionalisme SDM UMKM	Kesulitan dalam mengembangkan usaha	Optimalisasi Bimtek dan Pendampingan	Restrukturisasi dan Pembiayaan	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Presentase UMKM yang mengalami peningkatan tenaga kerja	Rendahnya Kesadaran perlindungan Perizinan Berusaha produk dan legalitas usaha	4	Penerbitan sertifikat yang tidak sesuai SOP	Rentan terkena permasalahan Hukum dan kepercayaan konsumen terkait legalitas Usaha	Pendampingan oleh Konsultan UMKM Center dan PLUT Jawa Tengah	Restrukturisasi dan Pembiayaan	Tahun 2025 - 2029
	Proporsi Akses Kredit bagi UMKM	Rendahnya partisipasi dan pemahaman UMKM terhadap materi	6	- Rendahnya minat dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya literasi	- Materi tidak terserap dengan baik - UMKM tetap kesulitan mengakses pembiayaan karena pencatatan tidak	Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Literasi berbasis wilayah, bekerja sama dengan pendamping lokal,	Restrukturisasi dan Pembiayaan	Tahun 2025 - 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		literasi keuangan dan digitalisasi pembukuan usaha.		keuangan dan pencatatan digital - Keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi	tertib - Citra program menjadi kurang efektif	dengan materi ringkas, studi kasus nyata, dan langsung mempraktikkan pencatatan keuangan digital.		
		Ketidakterpaduan dan ketidakakuratan data usaha kecil yang dihimpun.	6	- Ketidaksesuaian format atau standar input data antar kab/kota - Keterbatasan kapasitas SDM pengelola data - Kurangnya koordinasi dan pemantauan rutin	- Menghambat pengambilan keputusan yang tepat terkait kebijakan dan program UKM - Menurunnya kepercayaan stakeholder terhadap kualitas data - Duplikasi atau ketidaksesuaian intervensi program	Membentuk Tim Validasi Terpadu Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Tengah yang secara berkala (misalnya triwulanan) melakukan validasi dan sinkronisasi data bersama kabupaten/kota melalui sistem SIDT, didukung SOP dan template data standar.	Restrukturisasi dan Pembiayaan	Tahun 2025 - 2029
Sasaran								
Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	Perkembangan UMKM Non Pertanian belum bisa tumbuh optimal	12	UMKM Non Pertanian masih banyak yang terkendala dalam mengembangankan usahanya	Pemberdayaan UKM di Jawa Tengah belum diklasifikasi terpisah antara UKM Pertanian dan UKM Non Pertanian.	Mengoptimalkan pengelolaan basis data yang optimal.	Sekretariat	
Program								
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	Rendahnya pengetahuan dan keterampilan UMKM	12	Rendahnya komitmen peserta dalam mempraktekkan materi pelatihan	Pengembangan UMKM kurang optimal	Peningkatan UMKM dalam produktivitas dan pemasaran	Bina Usaha dan Pemasaran	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi produksi usahanya	Peserta Bimtek tidak mempraktekkan hasil bimteknya	12	Rendahnya komitmen peserta dalam mempraktekkan materi pelatihan	Pengembangan usaha kurang optimal	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui daring/luring	Bina Usaha dan Pemasaran	Tahun 2025 - 2029
0	Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi pemasaran dan jaringan usahanya	Sulitnya mengakses pasar yang lebih luas karena keterbatasan kapasitas usaha.	12	Keterbatasan dalam memenuhi standar kualitas dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk pasar yang lebih besar.	Sulitnya meningkatkan skala usaha akibat keterbatasan akses ke pasar potensial.	Perluasan akses pasar dan peningkatan standar kualitas melalui bimbingan teknis, pameran, dan kemitraan	Bina Usaha dan Pemasaran	Tahun 2025 - 2030

3.4 Isu Lintas Sektor

Dalam rangka meningkatkan sinergitas dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM di Jawa Tengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah melakukan identifikasi bersama dengan SKPD di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya mendorong kemandirian dan swasembada pangan, dengan target pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 koperasi desa/kelurahan di Indonesia serta 2.523 koperasi desa/kelurahan di Jawa Tengah melalui langkah-langkah komprehensif yang terintegrasi oleh para menteri, kepala badan, gubernur, dan bupati/walikota. Koperasi ini diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan ekonomi seperti pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, dan logistik di tingkat desa/kelurahan. Untuk itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan OPD di tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam mengidentifikasi kegiatan lintas sektor dalam mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Adapun hasil identifikasi tersebut tertuang dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Identifikasi Isu Lintas Sektor
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

No	Perangkat Daerah	Dukungan Strategi	Dukungan Arah Kebijakan	Aktivitas Riil	Satuan	Target Volume					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Dukungan kelembagaan ekonomi petani untuk mengembangkan kemampuan petani dalam pengelolaan kelembagaan usaha tani	Dukungan diarahkan untuk korporasi petani berbadan hukum koperasi	Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan korporasi petani	Korporasi	6	6	6	6	6	6
		Dukungan kelembagaan petani (gapoktan) menjadi kelembagaan berbadan hukum usaha petani dalam bentuk koperasi	Dukungan diarahkan untuk mendorong kelembagaan petani (gapoktan) menjadi kelembagaan petani berbadan hukum koperasi desa/kelurahan merah putih	Mendorong kelembagaan gapoktan menjadi kelembagaan usaha berbadan hukum koperasi desa/kelurahan merah putih berkolaborasi dengan Dinkop UKM Provinsi dan Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah	Koperasi	8,563	0	0	0	0	0

No	Perangkat Daerah	Dukungan Strategi	Dukungan Arah Kebijakan	Aktivitas Riil	Satuan	Target Volume					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan jaringan kemitraan bagi kelompok ternak/koperasi ternak	Pengembangan jaringan kerjasama antara Kelompok/Koperasi Ternak dengan Usaha Besar sebagai bagian dari rantai nilai	fasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan kelompok ternak	Kelompok	12	14	16	20	24	24
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan kapasitas Pengelola BUMDesa	Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Penguatan kapasitas pengelola BUMDes dengan klasifikasi pemula dan berkembang	Unit	350	500	500	500	500	500
		Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Penguatan manajemen Pemerintahan Desa bagi aparatur Pemerintahan Desa	Orang	-	728	728	728	728	728
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Percepatan integrasi Koperasi sebagai bagian dari Rantai Nilai Industri	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Pasang lelang komoditas	Kegiatan	-	2	3	4	5	6
				Kemitraan perdagangan	Kegiatan	-	2	3	4	5	6

No	Perangkat Daerah	Dukungan Strategi	Dukungan Arah Kebijakan	Aktivitas Riil	Satuan	Target Volume					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Dukungan transisi energi dan substitusi energi bagi Koperasi dan UMKM	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pembangunan infrastruktur EBT sebagai stimulan berupa PLTS Rooftop untuk koperasi dan UMKM di Jawa Tengah	Unit	3	3	3	3	3	3
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Dukungan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	RTP yang difasilitasi usahanya (sosialisasi pada nelayan perairan umum daratan/air tawar)	Unit	25	25	25	25	25	25
		Dukungan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya (pembinaan dan pelatihan)	Orang	25	30	30	30	30	30

No	Perangkat Daerah	Dukungan Strategi	Dukungan Arah Kebijakan	Aktivitas Riil	Satuan	Target Volume					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Ketahanan Pangan bagi Koperasi Desa	Dukungan diarahkan untuk mendukung Koperasi Desa	Penyediaan Kios Pangan Murah Untuk Mendukung Kemitraan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
8	Biro Perekonomian - Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Dukungan monitoring pengembangan KDMP	Dukungan untuk mendorong pengembangan KDMP	Monitoring evaluasi perkembangan KDMP	Kegiatan	1	1	1	1	1	1

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Kebijakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan yang disusun harus diiringi dengan kerangka pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu pada pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan, sasaran, program (*outcome*) dan kegiatan (output). Program dan kegiatan serta pendanaan tahun ke-1 s.d tahun ke-5 dapat dilihat pada tabel 4.1. Adapun untuk Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Baseline Tahun 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB (PE) *												6,362,648,000		8,807,036,000		9,549,113,000		11,385,293,000		11,837,282,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
							Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB *	%	14.9	12.99	13.52		13.68		13.87		14.08		14.23		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB **											3,804,066,000		5,489,454,000		5,831,531,000		7,267,711,000		7,759,700,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
							Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB **	%	N/A	2	2.16	3,804,066,000	2.34	5,489,454,000	2.53	5,831,531,000	2.74	7,267,711,000	2.88	7,759,700,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI ***									1,404,628,000		2,140,016,000		2,482,093,000		2,618,273,000		2,810,262,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
						Meningkatnya koperasi berkualitas tingkat provinsi	Persentase Koperasi Berkualitas ***	%	25.02	26.74	27.1	1,404,628,000	27.85	2,140,016,000	28.05	2,482,093,000	28.75	2,618,273,000	28.9	2,810,262,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
		2.17.03.1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****								714,244,000		1,049,632,000		1,191,709,000		1,237,889,000		1,319,878,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
						Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi ****	%	13.58	13.65	13.72	714,244,000	13.79	1,049,632,000	13.86	1,191,709,000	13.92	1,237,889,000	13.98	1,319,878,000	Pokja Kelembagaan	
		2.17.03.1.01.0003			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi *****							714,244,000		1,049,632,000		1,191,709,000		1,237,889,000		1,319,878,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
						Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi *****	Unit Usaha	40	120	160	714,244,000	180	1,049,632,000	190	1,191,709,000	200	1,237,889,000	210	1,319,878,000	Pokja Kelembagaan	JAWA TENGAH
		2.17.03.1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****								690,384,000		1,090,384,000		1,290,384,000		1,380,384,000		1,490,384,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
						Meningkatnya koperasi yang telah dilakukan pengawasan	Presentase koperasi yang telah dilakukan pengawasan ****	%	100	100	100	690,384,000	100	1,090,384,000	100	1,290,384,000	100	1,380,384,000	100	1,490,384,000	Pokja Pengawasan	
		2.17.03.1.02.0002			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****								690,384,000		1,090,384,000		1,290,384,000		1,380,384,000		1,490,384,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
						Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan *****	Unit Usaha	400	280	300	690,384,000	320	1,090,384,000	330	1,290,384,000	340	1,380,384,000	350	1,490,384,000	Pokja Pengawasan	JAWA TENGAH
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN ***									431,856,000		681,856,000		981,856,000		681,856,000		881,856,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas ***	%	N/A	90	91	431,856,000	92	681,856,000	93	981,856,000	94	681,856,000	95	881,856,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
		2.17.05.1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****								431,856,000		681,856,000		981,856,000		681,856,000		881,856,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Meningkatnya SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya	Presentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya ****	%	N/A	90	91	431,856,000	92	681,856,000	93	981,856,000	94	681,856,000	95	881,856,000	Pokja Pelatihan Perkoperasian dan UKM	
		2.17.05.1.01.0001			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi *****								431,856,000		681,856,000		981,856,000		681,856,000		881,856,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian *****	Orang	1675	200	150	431,856,000	180	681,856,000	210	981,856,000	240	681,856,000	270	881,856,000	Pokja Pelatihan Perkoperasian dan UKM	JAWA TENGAH
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI ***									1,967,582,000		2,667,582,000		2,367,582,000		3,967,582,000		4,067,582,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Bina Usaha Koperasi	
						Meningkatnya jumlah koperasi provinsi produktif	Persentase Koperasi Produktif ***	%	52.55	53.03	53.3	1,967,582,000	53.56	2,667,582,000	53.59	2,367,582,000	53.85	3,967,582,000	54	4,067,582,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Bina Usaha Koperasi	
		2.17.06.1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****								1,967,582,000		2,667,582,000		2,367,582,000		3,967,582,000		4,067,582,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Bina Usaha Koperasi	
						Meningkatnya permodalan Koperasi	Presentase pertumbuhan modal Koperasi ****	%	N/A	N/A	5.25	912,859,000	5.49	1,322,859,000	5.71	1,112,859,000	5.89	1,965,276,500	6	1,912,859,000	Pokja Manajemen Usaha dan Pembiayaan	
		2.17.06.1.01.0002			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha *****								810,753,000		1,110,753,000		960,753,000		1,713,170,500		1,610,753,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Bina Usaha Koperasi	
						Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha *****	Unit Usaha	N/A	145	150	810,753,000	180	1,110,753,000	200	960,753,000	220	1,713,170,500	230	1,610,753,000	Pokja Manajemen Usaha dan Pembiayaan	JAWA TENGAH
		2.17.06.1.01.0008			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****								102,106,000		212,106,000		152,106,000		252,106,000		302,106,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Bina Usaha Koperasi	
						Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya *****	Unit Usaha	N/A	N/A	50	102,106,000	70	212,106,000	90	152,106,000	120	252,106,000	150	302,106,000	Pokja Manajemen Usaha dan Pembiayaan	JAWA TENGAH
						Meningkatnya Volume Usaha Koperasi sektor Produksi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi ****	%	N/A	N/A	4.1	1,054,723,000	6.2	1,344,723,000	8.1	1,254,723,000	9.7	2,002,305,500	9.75	2,154,723,000	Pokja Produktivitas Usaha	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Baseline Tahun 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.17.06.1.01.0006			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							90,000,000		150,000,000		200,000,000		200,000,000		834,835,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Bina Usaha Koperasi	
						Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya *****	Unit Usaha	N/A	N/A	20	90,000,000	35	150,000,000	60	200,000,000	60	200,000,000	100	834,835,000	Pokja Produktivitas Usaha	JAWA TENGAH
		2.17.06.1.01.0009			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****							964,723,000		1,194,723,000		1,054,723,000		1,802,305,500		1,319,888,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Bina Usaha Koperasi	
						Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan *****	Unit Usaha	N/A	N/A	160	964,723,000	180	1,194,723,000	180	1,054,723,000	190	1,802,305,500	200	1,319,888,000	Pokja Produktivitas Usaha	JAWA TENGAH
	Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi **											2,558,582,000		3,317,582,000		3,717,582,000		4,117,582,000		4,077,582,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
							Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi **	%	N/A	10.39	10.49	2,558,582,000	10.59	3,317,582,000	10.71	3,717,582,000	10.82	4,117,582,000	10.91	4,077,582,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM ***									2,558,582,000		3,317,582,000		3,717,582,000		4,117,582,000		4,077,582,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM	
						Meningkatnya jumlah UMKM Non Pertanian yang mengalami Peningkatan Usaha	Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha ***	%	N/A	N/A	30	2,558,582,000	32	3,317,582,000	34.5	3,717,582,000	37	4,117,582,000	39	4,077,582,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM	
		2.17.08.1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah ****								2,558,582,000		3,317,582,000		3,717,582,000		4,117,582,000		4,077,582,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM	
						Meningkatnya jumlah UMKM non pertanian yang difasilitasi produksi usahanya	Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi produksi usahanya ****	%	50	55	60	443,338,000	65	793,338,000	70	1,093,338,000	75	1,393,338,000	80	1,253,338,000	Pokja Produksi dan Literasi Hukum	
		2.17.08.1.01.0001			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi *****							393,338,000		693,338,000		993,338,000		1,293,338,000		1,103,338,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM	
						Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi *****	Unit Usaha	455	280	225	393,338,000	255	693,338,000	270	993,338,000	300	1,293,338,000	285	1,103,338,000	Pokja Produksi dan Literasi Hukum	JAWA TENGAH
		2.17.08.1.01.0002			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM *****							50,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM	
						Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum *****	Orang	200	N/A	30	50,000,000	60	100,000,000	60	100,000,000	60	100,000,000	90	150,000,000	Pokja Produksi dan Literasi Hukum	JAWA TENGAH
						Meningkatnya jumlah UMKM non pertanian yang difasilitasi pemasaran dan jaringan usahanya	Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi pemasaran dan jaringan usahanya ****	%	50	55	60	2,115,244,000	65	2,524,244,000	70	2,624,244,000	75	2,724,244,000	80	2,824,244,000	Pokja Pemasaran dan Digitalisasi	
		2.17.08.1.01.0003			Pengembangan Usaha Kecil *****							2,115,244,000		2,524,244,000		2,624,244,000		2,724,244,000		2,824,244,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM	
						Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi *****	Unit Usaha	150	250	240	2,115,244,000	270	2,524,244,000	285	2,624,244,000	290	2,724,244,000	315	2,824,244,000	Pokja Pemasaran dan Digitalisasi	JAWA TENGAH
Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB (TPT) *												2,994,495,000		5,854,495,000		6,824,495,000		6,874,495,000		8,014,495,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
							Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB *	%	14.9	12.99	13.52		13.68		13.87		14.08		14.23		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Jawa Tengah **											2,994,495,000		5,854,495,000		6,824,495,000		6,874,495,000		8,014,495,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
							Rasio Kewirausahaan Daerah **	%	N/A	3.21	3.53	2,994,495,000	3.85	5,854,495,000	4.23	6,824,495,000	4.77	6,874,495,000	5.05	8,014,495,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) ***									2,229,503,000		4,659,503,000		4,459,503,000		4,709,503,000		5,349,503,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	
						Meningkatnya Pelaku Usaha yang dibantu buruh tetap	Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh ***	%	N/A	16.93	17.15	2,229,503,000	17.36	4,659,503,000	17.56	4,459,503,000	17.78	4,709,503,000	17.99	5,349,503,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	
		2.17.07.1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan *****								2,229,503,000		4,659,503,000		4,459,503,000		4,709,503,000		5,349,503,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	
						Meningkatnya UMKM yang mengalami peningkatan tenaga kerja	Presentase peningkatan tenaga kerja pada UMKM ****	%	N/A	N/A	5	1,525,138,000	5.25	3,625,138,000	5.4	3,225,138,000	6.09	3,675,138,000	6.4	4,215,138,000	Pokja Perlindungan Usaha	
		2.17.07.1.01.0010			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil *****							75,138,000		175,138,000		75,138,000		375,138,000		365,138,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	
						Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi *****	Unit Usaha	30	N/A	30	75,138,000	60	175,138,000	30	75,138,000	90	375,138,000	90	365,138,000	Pokja Perlindungan Usaha	JAWA TENGAH
		2.17.07.1.01.0011			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha *****							415,000,000		2,000,000,000		1,300,000,000		1,750,000,000		2,300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	
						Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi *****	Unit Usaha	500	100	90	415,000,000	510	2,000,000,000	90	1,300,000,000	90	1,750,000,000	90	2,300,000,000	Pokja Perlindungan Usaha	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Baseline Tahun 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.17.07.1.01.0012			Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil *****							1,035,000,000		1,450,000,000		1,850,000,000		1,550,000,000		1,550,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	
						Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Mengakses Perizinan Berusaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi *****	Unit Usaha	N/A	N/A	1134	1,035,000,000	1300	1,450,000,000	1500	1,850,000,000	1350	1,550,000,000	1350	1,550,000,000	Pokja Perlindungan Usaha	JAWA TENGAH
						Meningkatnya Akses Kredit Bagi UMKM	Proporsi Akses Kredit bagi UMKM ****	%	50.78	51.25	51.77	704,365,000	52.11	1,034,365,000	52.69	1,234,365,000	53.03	1,034,365,000	53.75	1,134,365,000	Pokja Pembiayaan dan Data	
		2.17.07.1.01.0005			Penyusunan Basis Data Usaha Kecil *****							61,492,000		153,509,000		133,949,000		124,797,000		138,161,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	
						Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata *****	Unit Usaha	N/A	N/A	1000	61,492,000	1700	153,509,000	1400	133,949,000	1500	124,797,000	1600	138,161,000	Pokja Pembiayaan dan Data	JAWA TENGAH
		2.17.07.1.01.0007			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil *****							642,873,000		880,856,000		1,100,416,000		909,568,000		996,204,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	
						Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi *****	Unit Usaha	660	300	270	642,873,000	510	880,856,000	660	1,100,416,000	540	909,568,000	630	996,204,000	Pokja Pembiayaan dan Data	JAWA TENGAH
		2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) ***									764,992,000		1,194,992,000		2,364,992,000		2,164,992,000		2,664,992,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Meningkatnya kualitas SDM UMKM	Persentase SDM UMKM yang berkualitas ***	%	N/A	90	91	514,992,000	92	794,992,000	93	1,414,992,000	94	1,214,992,000	95	1,414,992,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
		2.17.07.1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan ****								514,992,000		794,992,000		1,414,992,000		1,214,992,000		1,414,992,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Meningkatnya SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya	Presentase SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya ****	%	N/A	90	91	514,992,000	92	794,992,000	93	1,414,992,000	94	1,214,992,000	95	1,414,992,000	Pokja Pelatihan Perkoperasian dan UKM	
		2.17.07.1.01.0002			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan *****							514,992,000		794,992,000		1,414,992,000		1,214,992,000		1,414,992,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan *****	Orang	1050	1125	300	514,992,000	360	794,992,000	420	1,414,992,000	480	1,214,992,000	540	1,414,992,000	Pokja Pelatihan Perkoperasian dan UKM	JAWA TENGAH
						Meningkatnya kualitas SDM Wirausaha	Persentase Wirausaha yang berkualitas ***	%	N/A	N/A	85	250,000,000	86	400,000,000	87	950,000,000	88	950,000,000	89	1,250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
		2.17.07.1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan *****								250,000,000		400,000,000		950,000,000		950,000,000		1,250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Meningkatnya SDM Wirausaha yang meningkat pengetahuannya	Presentase SDM Wirausaha yang meningkat pengetahuannya ****	%	N/A	N/A	85	250,000,000	86	400,000,000	87	950,000,000	88	950,000,000	89	1,250,000,000	Pokja Kewirausahaan	
		2.17.07.1.01.0001			Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan *****							250,000,000		400,000,000		950,000,000		950,000,000		1,250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan *****	Unit Usaha	N/A	N/A	205	250,000,000	265	400,000,000	325	950,000,000	385	950,000,000	445	1,250,000,000	Pokja Kewirausahaan	JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah *												24,855,000,000		26,980,000,000		27,350,000,000		27,650,000,000		28,353,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah *	Angka	N/A	71	71.5		72		72.5		73		73.5		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah **											480,000,000		795,000,000		895,000,000		995,000,000		1,095,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah **	Angka	3	3.1	3.12	480,000,000	3.14	795,000,000	3.16	895,000,000	3.18	995,000,000	3.2	1,095,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									480,000,000		795,000,000		895,000,000		995,000,000		1,095,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ***	%	100	100	100	480,000,000	100	795,000,000	100	895,000,000	100	995,000,000	100	1,095,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								480,000,000		795,000,000		895,000,000		995,000,000		1,095,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	N/A	100	100	480,000,000	100	795,000,000	100	895,000,000	100	995,000,000	100	1,095,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Baseline Tahun 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							250,000,000		415,000,000		480,000,000		530,000,000		580,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	N/A	5	5	250,000,000	5	415,000,000	5	480,000,000	5	530,000,000	5	580,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							200,000,000		350,000,000		385,000,000		435,000,000		485,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	N/A	6	6	200,000,000	6	350,000,000	6	385,000,000	6	435,000,000	6	485,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah **											24,375,000,000		26,185,000,000		26,455,000,000		26,655,000,000		27,258,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah **	Angka	N/A	78	78.6	24,375,000,000	79	26,185,000,000	79.6	26,455,000,000	80	26,655,000,000	80.6	27,258,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									19,940,000,000		21,350,000,000		21,520,000,000		21,720,000,000		22,123,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ***	%	100	100	100	19,940,000,000	100	21,350,000,000	100	21,520,000,000	100	21,720,000,000	100	22,123,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								15,535,000,000		15,535,000,000		15,535,000,000		15,535,000,000		15,535,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	N/A	12	15,535,000,000	12	15,535,000,000	12	15,535,000,000	12	15,535,000,000	12	15,535,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							14,950,000,000		14,950,000,000		14,950,000,000		14,950,000,000		14,950,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	12	12	12	14,950,000,000	12	14,950,000,000	12	14,950,000,000	12	14,950,000,000	12	14,950,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							410,000,000		410,000,000		410,000,000		410,000,000		410,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	410,000,000	12	410,000,000	12	410,000,000	12	410,000,000	12	410,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****							0		0		0		0		0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	12	N/A	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****							175,000,000		175,000,000		175,000,000		175,000,000		175,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	12	12	12	175,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								90,000,000		95,000,000		95,000,000		95,000,000		100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	12	12	12	90,000,000	12	95,000,000	12	95,000,000	12	95,000,000	12	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							90,000,000		95,000,000		95,000,000		95,000,000		100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	90,000,000	1	95,000,000	1	95,000,000	1	95,000,000	1	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								12,000,000		35,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	12,000,000	100	35,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	88	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	12	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							5,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	20	10	15	5,000,000	18	15,000,000	20	15,000,000	20	15,000,000	20	15,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****							2,000,000		15,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	15	5	15	2,000,000	20	15,000,000	25	20,000,000	25	20,000,000	25	20,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								1,253,000,000		2,027,000,000		2,085,000,000		2,155,000,000		2,298,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Baseline Tahun 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	1,253,000,000	100	2,027,000,000	100	2,085,000,000	100	2,155,000,000	100	2,298,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							20,000,000		40,000,000		50,000,000		60,000,000		70,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	4	20,000,000	4	40,000,000	4	50,000,000	4	60,000,000	4	70,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							40,000,000		40,000,000		50,000,000		60,000,000		70,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	4	40,000,000	4	40,000,000	4	50,000,000	4	60,000,000	4	70,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							20,000,000		40,000,000		50,000,000		60,000,000		70,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	4	4	4	20,000,000	4	40,000,000	4	50,000,000	4	60,000,000	4	70,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							110,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	4	110,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							15,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	4	4	4	15,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							2,500,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	2,500,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							140,500,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	140,500,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							900,000,000		1,472,000,000		1,500,000,000		1,540,000,000		1,653,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	12	900,000,000	12	1,472,000,000	12	1,500,000,000	12	1,540,000,000	12	1,653,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	12	12	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							0		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								65,000,000		150,000,000		160,000,000		170,000,000		180,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	7	N/A	6	65,000,000	5	150,000,000	10	160,000,000	16	170,000,000	16	180,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							0		0		0		0		0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							25,000,000		100,000,000		110,000,000		120,000,000		130,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	10	N/A	1	25,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	1	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	8	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							40,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	3	40,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								2,590,000,000		3,016,000,000		3,070,000,000		3,150,000,000		3,360,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	12	2,590,000,000	12	3,016,000,000	12	3,070,000,000	12	3,150,000,000	12	3,360,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Baseline Tahun 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5,000,000		6,000,000		7,000,000		8,000,000		9,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	12	5,000,000	12	6,000,000	12	7,000,000	12	8,000,000	12	9,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							600,000,000		610,000,000		615,000,000		620,000,000		625,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	600,000,000	12	610,000,000	12	615,000,000	12	620,000,000	12	625,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							25,000,000		40,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	25,000,000	12	40,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1,960,000,000		2,360,000,000		2,388,000,000		2,462,000,000		2,666,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	1,960,000,000	12	2,360,000,000	12	2,388,000,000	12	2,462,000,000	12	2,666,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								395,000,000		492,000,000		535,000,000		575,000,000		610,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	12	12	12	395,000,000	12	492,000,000	12	535,000,000	12	575,000,000	12	610,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							25,000,000		27,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	12	12	12	25,000,000	12	27,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							180,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	12	12	12	180,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	12	12	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							50,000,000		60,000,000		70,000,000		80,000,000		90,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	12	12	12	50,000,000	12	60,000,000	12	70,000,000	12	80,000,000	12	90,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	2	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							50,000,000		100,000,000		120,000,000		140,000,000		160,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	12	12	12	50,000,000	12	100,000,000	12	120,000,000	12	140,000,000	12	160,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							40,000,000		55,000,000		65,000,000		75,000,000		80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	12	12	12	40,000,000	12	55,000,000	12	65,000,000	12	75,000,000	12	80,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									4,435,000,000		4,835,000,000		4,935,000,000		4,935,000,000		5,135,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan ***	%	100	100	100	4,435,000,000	100	4,835,000,000	100	4,935,000,000	100	4,935,000,000	100	5,135,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								224,000,000		282,000,000		284,000,000		250,000,000		235,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan ****	%	N/A	100	100	224,000,000	100	282,000,000	100	284,000,000	100	250,000,000	100	235,000,000	Subbag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							35,000,000		45,000,000		45,000,000		40,000,000		40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	4	35,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							35,000,000		45,000,000		45,000,000		40,000,000		40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	4	35,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							35,000,000		45,000,000		45,000,000		40,000,000		40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Baseline Tahun 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	4	35,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							50,000,000		53,000,000		55,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	12	50,000,000	12	53,000,000	12	55,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							9,000,000		9,000,000		9,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	12	9,000,000	12	9,000,000	12	9,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							60,000,000		85,000,000		85,000,000		75,000,000		60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	4	4	60,000,000	4	85,000,000	4	85,000,000	4	75,000,000	4	60,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								178,000,000		195,000,000		140,000,000		34,000,000		34,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan ****	Unit	N/A	52	23	178,000,000	33	195,000,000	41	140,000,000	49	34,000,000	49	34,000,000	Subbag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							30,000,000		35,000,000		15,000,000		4,000,000		4,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	5	30,000,000	5	35,000,000	3	15,000,000	2	4,000,000	2	4,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							8,000,000		10,000,000		20,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	2	8,000,000	2	10,000,000	3	20,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							85,000,000		90,000,000		90,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	5	8	85,000,000	8	90,000,000	8	90,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							55,000,000		60,000,000		15,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	47	7	55,000,000	6	60,000,000	3	15,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								3,714,500,000		3,921,000,000		4,139,000,000		4,344,000,000		4,589,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan ****	Laporan	N/A	12	12	3,714,500,000	12	3,921,000,000	12	4,139,000,000	12	4,344,000,000	12	4,589,000,000	Subbag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	4	4	4,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							835,000,000		840,000,000		845,000,000		835,000,000		835,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	12	835,000,000	12	840,000,000	12	845,000,000	12	835,000,000	12	835,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							24,500,000		26,000,000		25,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Baseline Tahun 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	2	2	24,500,000	2	26,000,000	2	25,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							2,851,000,000		3,051,000,000		3,265,000,000		3,495,000,000		3,740,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	12	2,851,000,000	12	3,051,000,000	12	3,265,000,000	12	3,495,000,000	12	3,740,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								318,500,000		437,000,000		372,000,000		307,000,000		277,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan ****	Unit	N/A	75	80	318,500,000	85	437,000,000	90	372,000,000	95	307,000,000	95	277,000,000	Subbag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								45,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		45,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	4	4	45,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	45,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							15,500,000		17,000,000		10,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	3	15,500,000	6	17,000,000	3	10,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							57,000,000		60,000,000		57,000,000		57,000,000		57,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	22	15	57,000,000	15	60,000,000	15	57,000,000	15	57,000,000	15	57,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							35,000,000		35,000,000		30,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	1	35,000,000	1	35,000,000	1	30,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							100,000,000		200,000,000		150,000,000		100,000,000		75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	3	3	100,000,000	4	200,000,000	4	150,000,000	4	100,000,000	4	75,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							66,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	131	100	66,000,000	110	75,000,000	110	75,000,000	110	75,000,000	110	75,000,000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi

Tabel 4.2

Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025 – 2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Outcome*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1.	PP. Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren	Penyuluhan Pendirian Koperasi Pesantren	Terlaksananya penyuluhan pendirian Koperasi Pesantren. Target : Duplikasi Kegiatan dengan Program Taktis	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi / Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	-
2.	PP. Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren	Pemberdayaan Koppontren sebagai Pendidikan Sosial dan Ekonomi Santri	Terlaksananya Pemberdayaan Koppontren sebagai Pendidikan Sosial dan Ekonomi Santri Target : Duplikasi Kegiatan dengan Program Taktis	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi / Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi / Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi / Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha / Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pembiayaan	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Bina Usaha Koperasi	-

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Outcome*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
3.	PA. Pengembangan *sister province*	Pengiriman Produk	Terkirimnya produk UKM Target : Tahun 2027 : 2 UKM Tahun 2029 : 2 UKM	Program Pengembangan UMKM / Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha / Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM	Biro Pemotdaker Setda Prov. Jateng
4.	PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Layanan Pendampingan Usaha KUMKM di UMKM Center Semarang	Terlaksananya Pendampingan Usaha di UMKM Center Semarang Target : Tahun 2025 : 240 UKM Tahun 2026 : 240 UKM Tahun 2027 : 240 UKM Tahun 2028 : 240 UKM Tahun 2029 : 240 UKM Tahun 2030 : 240 UKM	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	-
5.	PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Layanan Pendampingan Usaha KUMKM melalui PLUT Banyumas	Terlaksananya Pendampingan Usaha di PLUT Banyumas Target : Tahun 2025 : 420 UKM Tahun 2026 : 420 UKM Tahun 2027 : 420 UKM Tahun 2028 : 420 UKM Tahun 2029 : 420 UKM Tahun 2030 : 420 UKM	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Outcome*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
6.	PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Inkubator Bisnis K UMKM melalui tahapan untuk pelaku bisnis dan UMKM	Terlaksananya Inkubasi Bisnis Target : *Menyesuaikan*	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – UPTD Balatkop UKM dan Kewirausahaan	1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Jateng; 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. Jateng.
7.	PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Layanan Pendampingan Start Up / Wirausaha melalui Coworking Space Hetero Space Semarang	Terlaksananya Pendampingan Start Up / Wirausaha melalui Coworking Space Hetero Space Semarang Target : Tahun 2025 : 0 Tahun 2026 : 1.000 orang Tahun 2027 : 1.000 orang Tahun 2028 : 1.000 orang Tahun 2029 : 1.000 orang Tahun 2030 : 1.000 orang	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – UPTD Balatkop UKM dan Kewirausahaan	-
8.	PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka	Layanan Pendampingan Start Up / Wirausaha melalui	Terlaksananya Pendampingan Start Up / Wirausaha melalui Coworking Space Hetero Space Solo	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan,	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – UPTD Balatkop UKM dan Kewirausahaan	-

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Outcome*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
	lapangan kerja	Coworking Space Hetero Space Solo	Target : Tahun 2025 : 0 Tahun 2026 : 1.000 orang Tahun 2027 : 1.000 orang Tahun 2028 : 1.000 orang Tahun 2029 : 1.000 orang Tahun 2030 : 1.000 orang	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		
9.	PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Layanan Pendampingan Start Up / Wirausaha melalui Coworking Space Hetero Space Banyumas	Terlaksananya Pendampingan Start Up / Wirausaha melalui Coworking Space Hetero Space Banyumas Target : Tahun 2025 : 0 Tahun 2026 : 1.000 orang Tahun 2027 : 1.000 orang Tahun 2028 : 1.000 orang Tahun 2029 : 1.000 orang Tahun 2030 : 1.000 orang	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – UPTD Balatkop UKM dan Kewirausahaan	-
10.	PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Akademi Balatkop	Terlaksananya pengembangan UKM dan kewirausahaan melalui akademi balatkop Target : Tahun 2025 : 0 Tahun 2026 : 1.000 orang Tahun 2027 : 1.000 orang Tahun 2028 : 1.000 orang Tahun 2029 : 1.000 orang	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – UPTD Balatkop UKM dan Kewirausahaan	-

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Outcome*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
			Tahun 2030 : 1.000 orang	Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		
11.	PT. Mendorong Program *Santri Preneur* (Santri Pengusaha)	Penyuluhan Pendirian Koperasi Pesantren	Terlaksananya penyuluhan pendirian Koperasi Pesantran Target : Tahun 2025 : 60 Orang Tahun 2026 : 30 Orang Tahun 2027 : 30 Orang Tahun 2028 : 30 Orang Tahun 2029 : 30 Orang Tahun 2030 : 30 Orang	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi / Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-
12.	PT. Mendorong Program *Santri Preneur* (Santri Pengusaha)	Penguatan Produk Unggulan daerah berbasis Kopontren	Terlaksananya penguatan produk unggulan daerah berbasis Kopontren Target : Tahun 2025 : 100 Orang Tahun 2026 : 100 Orang Tahun 2027 : 100 Orang Tahun 2028 : 100 Orang Tahun 2029 : 100 Orang Tahun 2030 : 100 Orang	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi / Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Bina Usaha Koperasi	Biro Kesra Setda Prov. Jateng
13.	PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Identifikasi Partner Kerjasama Pengembangan Cafe Berdaya di setiap	Terlaksananya Identifikasi Partner Kerjasama Pengembangan Cafe Berdaya di setiap Kecamatan Target :	Program Pengembangan UMKM / Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah / Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM	1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Jateng; 2. Dinas Kebudayaan,

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Outcome*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		Kecamatan	Tahun 2027 : 1 Kegiatan Tahun 2029 : 1 Kegiatan	Sumber Daya Manusia, Serta Desain Teknologi		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. Jateng.
14.	PI. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*)	Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif (bagi Perempuan)	Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha produktif bagi perempuan Target : Duplikasi Kegiatan dengan Program Taktis	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – UPTD Balatkop UKM dan Kewirausahaan	-
15.	PI. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*)	Literasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan literasi keuangan Target : Duplikasi Kegiatan dengan Program Taktis	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	-

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Outcome*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
16.	PA. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha (Sertifikasi Jaminan Halal) bagi UKM	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi jaminan halal bagi UKM Target : Tahun 2025 : 100 Orang Tahun 2026 : 90 Orang Tahun 2027 : 500 Orang Tahun 2028 : 90 Orang Tahun 2029 : 90 Orang Tahun 2030 : 90 Orang	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	-
17.	PA. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Fasilitasi Hak Merk (UMKM)	Terlaksananya fasilitasi hak merk UMKM Target : Tahun 2026 : 30 Orang Tahun 2027 : 60 Orang Tahun 2028 : 30 Orang Tahun 2029 : 90 Orang Tahun 2030 : 90 Orang	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	-
18.	PA. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Pemberian subsidi bunga untuk pembiayaan khusus UMKM yang tergabung dalam kelompok usaha/koperasi	Terlaksananya pemberian subsidi bunga untuk pembiayaan khusus UMKM yang tergabung dalam kelompok usaha/koperasi dalam program 1 Desa 1 Kelompok Usaha/Koperasi	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan /	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	Biro Perekonomian Setda Prov. Jateng

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Outcome*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		dalam program 1 Desa 1 Kelompok Usaha/Koperasi	Target : Tahun 2026 : 20 Orang Tahun 2027 : 20 Orang Tahun 2028 : 20 Orang Tahun 2029 : 20 Orang Tahun 2030 : 20 Orang	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil		
19.	PA. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Layanan Pendampingan UMKM melalui kegiatan NGUCING (Ngobrol Usaha Mancing Ilmu) dan JUGURAN (Jagongan Usaha Golet Ilmu lan Seduluran)	Terlaksananya pendampingan UMKM Target : Tahun 2025 : 800 Orang Tahun 2026 : 30 Orang	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	-
20.	PA. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Kontak Bisnis	Terlaksananya Kontak Bisnis Target : Tahun 2025 : 1 Orang Tahun 2026 : 30 Orang Tahun 2027 : 30 Orang Tahun 2028 : 30 Orang Tahun 2029 : 30 Orang Tahun 2030 : 30 Orang	Program Pengembangan UMKM / Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah / Pengembangan Usaha Kecil	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	-

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Outcome*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
21.	PA. Pendirian Koperasi Buruh	Penguatan Kelembagaan bagi Koperasi Buruh di Jawa Tengah	Terlaksananya penguatan kelembagaan bagi Koperasi Buruh di Jawa Tengah Target : Tahun 2025 : 1 Koperasi Tahun 2026 : 30 Koperasi Tahun 2027 : 30 Koperasi Tahun 2028 : 30 Koperasi Tahun 2029 : 30 Koperasi Tahun 2030 : 30 Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi / Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Bina Usaha Koperasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng
22.	PA. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Penguatan kapasitas bagi Pengurus/Pengawas Koperasi Desa	Terlaksananya penguatan kapasitas pengurus/pengawas Koperasi Desa Target : Tahun 2025 : 100 Orang Tahun 2026 : 90 Orang Tahun 2027 : 120 Orang Tahun 2028 : 120 Orang Tahun 2029 : 150 Orang Tahun 2030 : 150 Orang	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi / Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Bina Usaha Koperasi	1. Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Jateng; 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Jateng; 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng; 4. Dinas Energi dan Sumber

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Outcome*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
						Daya Mineral Prov. Jateng; 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng; 6. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng; 7. Biro Perekonomian - Sekretariat Daerah Prov. Jateng.
23.	PA. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Penguatan manajemen usaha bagi Koperasi Desa	Terlaksananya penguatan manajemen usaha bagi Koperasi Desa Target : Tahun 2026 : 90 Orang Tahun 2027 : 120 Orang Tahun 2028 : 150 Orang Tahun 2029 : 180 Orang Tahun 2030 : 180 Orang	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi / Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – Bidang Bina Usaha Koperasi	1. Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Jateng; 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Jateng; 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Outcome*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
						Prov. Jateng; 4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jateng; 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng; 6. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng; Biro Perekonomian - Sekretariat Daerah Prov. Jateng.
24.	PT. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Pelatihan Ketrampilan Usaha Produktif bagi Perempuan Pesisir	Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha produktif bagi perempuan Target : Tahun 2026 : 25 Orang Tahun 2027 : 25 Orang Tahun 2028 : 25 Orang Tahun 2029 : 25 Orang Tahun 2030 : 25 Orang	Program Pemberdayaan UMKM / Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng – UPTD Balatkop UKM dan Kewirausahaan	-
25.	PT. Pelatihan	Literasi	Terlaksananya kegiatan literasi	Program Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi	-

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	*Outcome*/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
	pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Keuangan	keuangan Target : Tahun 2026 : 2 Kegiatan Tahun 2028 : 2 Kegiatan Tahun 2030 : 2 Kegiatan	/ Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan / Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	UKM Prov. Jateng – Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan dan merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP). Adapun rincian IKU sebagaimana Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja Utama	*Baseline* Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	83,13	71	71.5	72	72.5	73	73.5	
1.a	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,75	90,75	78	78.6	79	79.6	80	80.6	
1.b	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	0	3	3.1	3.12	3.14	3.16	3.18	3.2	
2	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	6.81	14.9	12.99	13.52	13.68	13.87	14.08	14.23	
2.a	Rasio Kewirausahaan Daerah	0	0	3.21	3.53	3.85	4.23	4.77	5.05	
2.b	Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	0	0	10.39	10.49	10.59	10.71	10.82	10.91	
2.c	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0	0	2	2.16	2.34	2.53	2.74	2.88	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan atau kegiatan. IKK digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun IKK pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	*Baseline* Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2,54%	2,74%	2,86%	2,97%	3,12%	3,35%	3,48%	3,62%	
2	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	41,86%	38,74%	40,36%	41,15%	41,23%	42,41%	43,1%	43,72%	
3	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	2,27%	3,54%	3,95%	4,23%	4,41%	4,7%	5,05%	5,17%	
4	Pertumbuhan Wirausaha	6,23%	4,26%	4,28%	4,30%	4,31%	4,33%	4,34%	4,36%	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun bersamaan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dengan mengikuti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045.

Renstra ini diharapkan sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Disamping itu juga sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rancangan akhir Renstra pada Perangkat Daerah akan diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa tengah dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra, kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029;
3. Pejabat eselon IV, sub koordinator, dan aparatur di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029 dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun;

5. Rencana strategis pembangunan Koperasi dan UKM diharapkan dapat menciptakan iklim usaha, memacu semangat berusaha, membangun jiwa kewirausahaan dan meningkatkan perkembangan Koperasi dan UKM di Jawa Tengah guna mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029;
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah memerlukan perbaikan atau revisi, maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029 jika pada kesempatan yang sama RPJMD Provinsi Jawa Tengah dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan;
8. Renstra ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan Koperasi dan UKM di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi masyarakat serta gerakan Koperasi dan UKM dalam membangun dan bersinergi untuk mewujudkan Koperasi dan UKM yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari;
9. Akhir kata diharapkan peran serta masyarakat khususnya gerakan Koperasi dan UKM untuk secara bersama-sama mewujudkan Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian Jawa Tengah.

Semarang, 2025

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOPERASI

EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660611 198602 1 001

1. Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Lampiran 1
Pohon Kinerja Perangkat Daerah

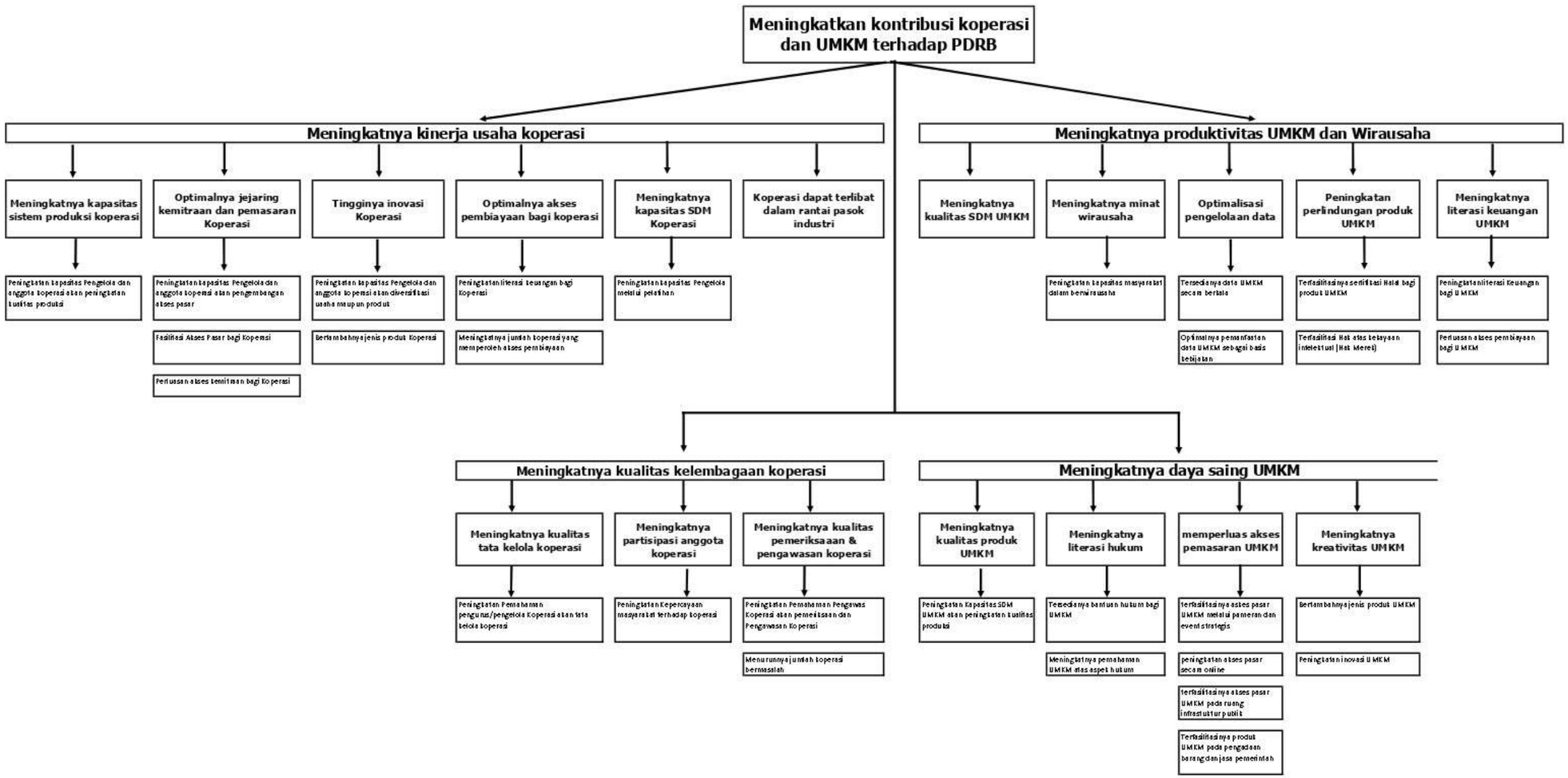

2. *Cascading* Perangkat Daerah

Lampiran 2
Cascading Perangkat Daerah

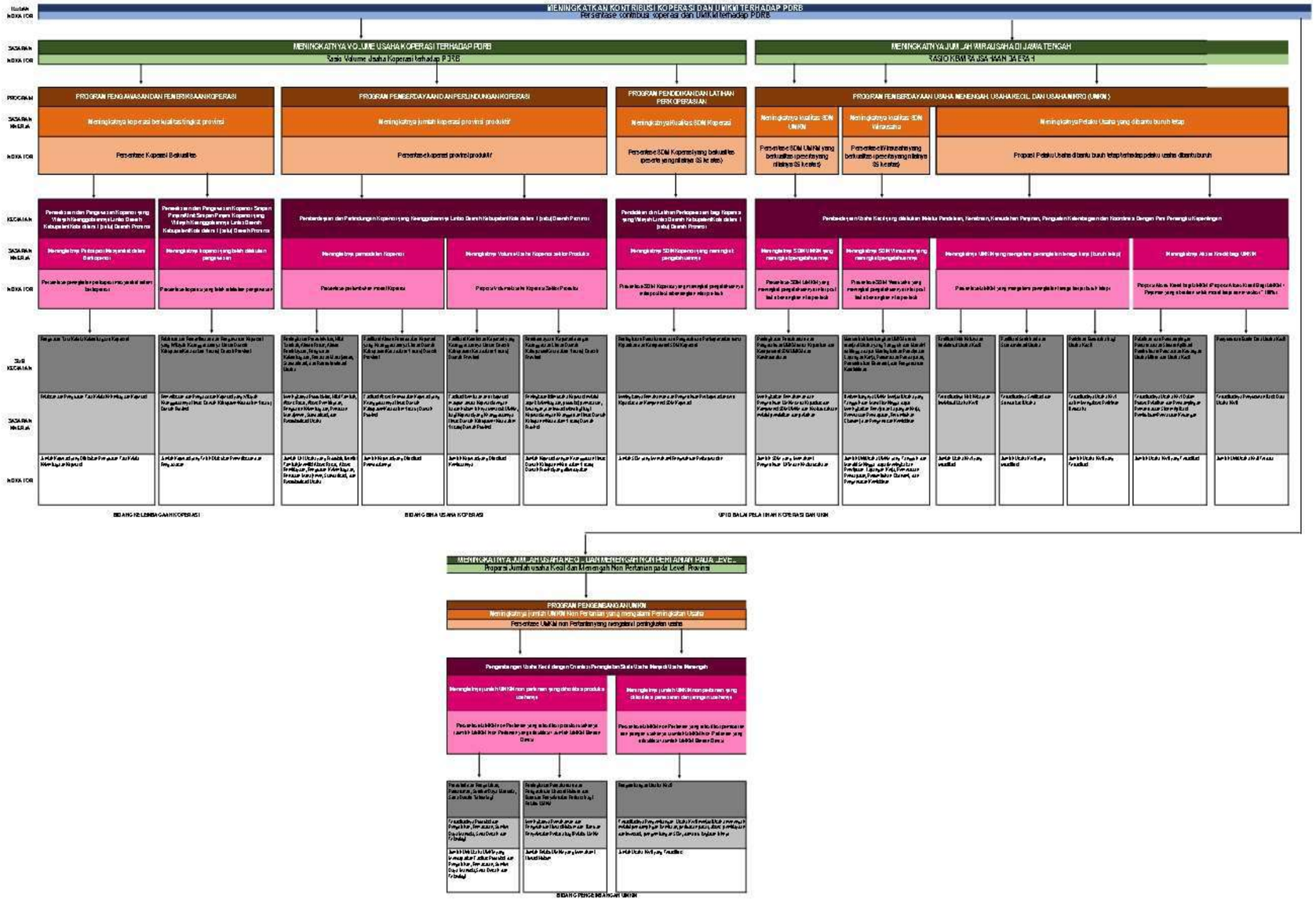

3. Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah menerapkan perencanaan berbasis risiko. Proses manajemen risiko mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

A. Identifikasi Risiko

Lampiran 4.1
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		Bidang/UPTD
							Uraian	Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tujuan							
	Sasaran Strategis	Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB tidak dapat optimal.	Risiko Operasional	Munculnya dinamika dalam perekonomian.	Dinamika perekonomian seperti perubahan minat konsumen, keterbasan produksi, dan jaringan pemasaran yang kurang optimal.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Koperasi, dan UMKM.	Sekretariat
		Sasaran							
	Sasaran Strategis	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Terjadi perbedaan pemahaman dalam menghitung Volume Usaha Koperasi	Risiko Kebijakan	Petugas data di Kab./Kota masih belum memahami perhitungan Volume Usaha Koperasi.	Ditetapkannya Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024 memberikan wawasan baru bagi seluruh petugas data dalam menghitung Volume Usaha Koperasi yang selama ini berbeda. Hal ini berdampak pada perhitungan data yang menjadi bias.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Koperasi.	Sekretariat
		Program							

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		Bidang/UPTD
							Uraian	Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	masih banyaknya koperasi yang tidak mematuhi peraturan perkoperasian yang berlaku	Risiko Kepatuhan	banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan prinsip dan jatidiri koperasi dalam pengelolaan usahanya	banyaknya koperasi yang tidak dapat memenuhi standar koperasi sehat dan memicu munculnya berbagai permasalahan koperasi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Koperasi, anggota koperasi, masyarakat	Pengawasan
		Kegiatan							
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	rekomendasi pemeriksaan kesehatan yang tidak ditindaklanjuti oleh koperasi	Risiko Kepatuhan	masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan koperasi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan koperasi	Beberapa rekomendasi pemeriksaan kesehatan tidak dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pengurus/pengelola koperasi karena satu dan lain hal, sehingga menyebabkan penyimpangan yang terjadi menjadi temuan berulang dan berdampak pada progres peningkatan kualitas kinerja dan kepatuhan koperasi terhadap regulasi yang berlaku.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Koperasi	Pengawasan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		Bidang/UPTD
							Uraian	Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan							
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase koperasi yang telah dilakukan pengawasan	Kebenaran data dukung yang disajikan pengurus/pengelola koperasi	Risiko Operasional	Penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai kondisi riil koperasi	Pemeriksaan kesehatan koperasi bertumpu pada informasi yang disampaikan dan data dukung yang disajikan oleh pengurus, apabila terdapat ketidaksesuaian antara hal tersebut dengan kondisi riil koperasi, maka hasil pemeriksaan kesehatan koperasi, termasuk predikat kesehatan yang diperoleh, menjadi tidak akurat.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Koperasi	Pengawasan
		Program							
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi provinsi produktif	Masih Rendahnya Koperasi Aktif di Jawa Tengah yang Melaksanakan dan Melaporkan RAT	Risiko Operasional	Adanya Permasalahan Manajerial dan Keuangan dalam Koperasi	Permasalahan Manajerial dapat berupa Pengurus tidak memahami cara pengelolaan kelembagaan Koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Permasalahan Keuangan dapat berupa Pengurus tidak memahami pengelolaan usaha Koperasi, sehingga Koperasi mengalami penurunan omzet usaha	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Koperasi	Kelembagaan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		Bidang/UPTD
							Uraian	Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan							
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase pertumbuhan modal Koperasi	Kurangnya efisien pengelolaan operasional dan manajemen keuangan	Resioko Operasional dan Resiko Keuangan	Kurangnya pemahaman Pengurus/Pengelola Koperasi dalam Manajemen Produksi Usaha Koperasi, sehingga dapat mempengaruhi keuangan dan biaya operasional dalam produksi	Koperasi mengalami penurunan volume usaha produksi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Koperasi	Kelembagaan
			Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Jumlah Anggota Koperasi Mengalami Penurunan	Risiko Operasional	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Perkoperasian	Kurangnya Minat Masyarakat untuk Bergabung dengan Koperasi, Kurangnya Partisipasi Anggota Koperasi,	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Koperasi	Kelembagaan
		Program							
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Berkualitas	Rendahnya pemahaman dan pengetahuan Pengelola/Pengurus/Pengawas Koperasi	Resiko Operasional	1. Kurangnya kesadaran Koperasi untuk mengikutsertakan Pengelola/Pengurus/Pengawas dalam program pelatihan 2. Peserta tidak mampu menerapkan ilmu yang didapat	Kinerja Koperasi tidak maksimal yang memuncullkan resiko kesalahan dan pemyelewengan dalam pengelolaan Koperasi serta tingkat kepercayaan Masyarakat kepada Koperasi menurun dengan kurangnya kualitas SDM Koperasi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Kab/Kota Koperasi Masyarakat	Balatkop UKM

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		Bidang/UPTD
							Uraian	Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan							
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya (nilai post test dibandingkan nilai pre test)	Rendahnya jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya pasca pelatihan dan minimnya implementasi materi/ilmu yang didapat pasca pelatihan	Resiko Operasional Resiko SDM	1. Kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti program Pelatihan 2. Minimnya Minat peserta dalam mengikuti pelatihan 3. Materi, metode pembelajaran dan narasumber yang tidak sesuai	Kinerja Koperasi tidak maksimal karena tidak meningkatnya pengetahuan SDM Pengelola/Pengurus/Pengawas Koperasi pasca pelatihan sehingga menyebabkan menurunya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi serta daya saing Koperasi yang rendah. Tidak efektifnya pola dan hasil pelatihan yang dilaksanakan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Kab/Kota Koperasi Masyarakat	Balatkop UKM
		Sasaran							
	Sasaran Strategis	Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Jawa Tengah	Rasio Kewirausahaan Daerah	Adanya potensi pertumbuhan kewirausahaan yang menurun.	Risiko Operasional	Perkembangan kewirausahaan di Jawa Tengah belum optimal.	Dinamika perekonomian secara global dapat berdampak kepada menurunnya minat masyarakat dalam berwirausaha.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Wirausaha.	Sekretariat
		Program							
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase SDM UMKM yang berkualitas	rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM UMKM	risiko operasional	1. Kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti program Pelatihan 2. Materi, metode pembelajaran yang belum optimal	kurang optimalnya perkembangan usaha	UMKM	Balatkop UKM

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		Bidang/UPTD
							Uraian	Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan							
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Presentase SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya	rendahnya jumlah SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya	risiko operasional	rendahnya implementasi materi paska pelatihan	kurang optimalnya perkembangan usaha	UMKM	Balatkop UKM
		Program							
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Wirausaha yang berkualitas	rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM UMKM	risiko operasional	1. Kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti program Pelatihan 2. Materi, metode pembelajaran dan narasumber yang belum optimal	kurang optimalnya perkembangan usaha	UMKM	Balatkop UKM
		Kegiatan							
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Presentase SDM Wirausaha yang meningkat pengetahuannya	rendahnya jumlah SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya	risiko operasional	rendahnya implementasi materi paska pelatihan	kurang optimalnya usaha	UMKM	Balatkop UKM
		Program							

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		Bidang/UPTD
							Uraian	Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	Rendahnya manajemen SDM UMKM	Risiko Operasional	Kurangnya profesionalisme SDM UMKM	Kesulitan dalam mengembangkan usaha	UMKM	Restrukturisasi dan Pembiayaan
		Kegiatan							
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Presentase UMKM yang mengalami peningkatan tenaga kerja	Rendahnya Kesadaran perlindungan Perizinan Berusaha produk dan legalitas usaha	Risiko Operasional	Penerbitan sertifikat yang tidak sesuai SOP	Rentan terkena permasalahan Hukum dan kepercayaan konsumen terkait legalitas Usaha	UMKM	Restrukturisasi dan Pembiayaan
			Proporsi Akses Kredit bagi UMKM	Rendahnya partisipasi dan pemahaman UMKM terhadap materi literasi keuangan dan digitalisasi pembukuan usaha.	Risiko Operasional	- Rendahnya minat dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya literasi keuangan dan pencatatan digital - Keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi	- Materi tidak terserap dengan baik - UMKM tetap kesulitan mengakses pembiayaan karena pencatatan tidak tertib - Citra program menjadi kurang efektif	- UMKM peserta kegiatan - Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Tengah - Mitra lembaga keuangan pendukung program	Restrukturisasi dan Pembiayaan
				Ketidakterpaduan dan ketidakakuratan data usaha kecil yang dihimpun.	Risiko Informasi dan Data	- Ketidaksesuaian format atau standar input data antar kab/kota - Keterbatasan kapasitas SDM pengelola data - Kurangnya	- Menghambat pengambilan keputusan yang tepat terkait kebijakan dan program UKM - Menurunnya kepercayaan stakeholder terhadap kualitas data	- Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Tengah - Dinas yang membina Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota - UMKM - Kementerian UMKM RI	Restrukturisasi dan Pembiayaan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak		Bidang/UPTD
							Uraian	Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						koordinasi dan pemantauan rutin	- Duplikasi atau ketidaksesuaian intervensi program	- Kementerian Koperasi RI	
		Sasaran							
	Sasaran Strategis	Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	Perkembangan UMKM Non Pertanian belum bisa tumbuh optimal	Risiko Operasional	UMKM Non Pertanian masih banyak yang terkendala dalam mengembangakan usahanya	Pemberdayaan UKM di Jawa Tengah belum diklasifikasi terpisah antara UKM Pertanian dan UKM Non Pertanian.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan UMKM.	Sekretariat
		Program							
		Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	Rendahnya pengetahuan dan keterampilan UMKM	Risiko Operasional	Rendahnya komitmen peserta dalam mempraktekkan materi pelatihan	Pengembangan UMKM kurang optimal	UMKM	Bina Usaha dan Pemasaran
		Kegiatan							
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi produksi usahanya	Peserta Bimtek tidak mempraktekkan hasil bimteknya	Risiko Operasional	Rendahnya komitmen peserta dalam mempraktekkan materi pelatihan	Pengembangan usaha kurang optimal	UMKM	Bina Usaha dan Pemasaran
			Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi pemasaran dan jaringan usahanya	Sulitnya mengakses pasar yang lebih luas karena keterbatasan kapasitas usaha.	Risiko Operasional	Keterbatasan dalam memenuhi standar kualitas dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk pasar yang lebih besar.	Sulitnya meningkatkan skala usaha akibat keterbatasan akses ke pasar potensial.	UMKM	Bina Usaha dan Pemasaran

B. Analisis Risiko

Lampiran 4.2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian			Bidang/UPTD
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	4	4	16	ada	Memberikan pelayanan bagi Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah dalam mengembangan usaha	memadai	3	4	12	Sekretariat
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	4	4	16	ada	Memfasilitasi Koperasi dalam peningkatan kinerja usaha	memadai	3	4	12	Sekretariat
Persentase koperasi berkualitas	4	5	20	ada	Peningkatan Kepatuhan koperasi melalui Rekomendasi/saran tindak atas temuan pemeriksaan kesehatan koperasi, SK Sanksi, Surat Teguran, Bimbingan Teknis Pemahaman Aspek Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, Bimbingan Teknis Peningkatan Kepatuhan Koperasi	memadai	3	5	15	Pengawasan
Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	3	5	15	ada	dilakukan pemantauan terhadap progres tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kesehatan tahun buku sebelumnya, mengadakan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kepatuhan	memadai	3	3	9	Pengawasan

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian			Bidang/UPTD
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					koperasi					
Presentase koperasi yang telah dilakukan pengawasan	3	5	15	ada	Setiap koperasi wajib menyusun surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh data dukung dan informasi yang disampaikan kepada tim pemeriksa kesehatan adalah benar sesuai dengan kondisi riil koperasi dan dapat dipertanggungjawabkan.	memadai	3	4	12	Pengawasan
Persentase koperasi provinsi produktif	3	5	15	Ada	Mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kualitas RAT bagi Koperasi yang Baru/Belum RAT	Memadai	3	4	12	Kelembagaan
Presentase pertumbuhan modal Koperasi	3	5	15		*Mengadakan Kegiatan : Pemberdayaan Aspek Produksi, Pemasran dan Keuangan Koperasi*	Memadai	3	3	9	Kelembagaan
Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	3	5	15	Ada	Mengadakan Kegiatan : 1. Sosialisasi Pemasyarakatan Perkoperasian 2. Penyebaran Informasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi	Memadai	3	3	9	Kelembagaan

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian			Bidang/UPTD
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase SDM Koperasi yang Berkualitas	4	5	20	ada	Peningkatan pengetahuan dan Kompetensi SDM Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi'	Memadai	3	4	12	Balatkop UKM
Presentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya (nilai post test dibandingkan nilai pre test)	4	5	20	ada	Penyelenggarakan Kegiatan Pealtihan : 1. Manajerial Bagi Koperasi 2. Kompetensi Bagi Koperasi 3. Perkoperasian bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi	Memadai	3	3	9	Balatkop UKM
Rasio Kewirausahaan Daerah	3	5	15		Menumbuhkan minat berwirausaha di Jawa Tengah melalui pelatihan dan pendampingan	memadai	3	4	12	Sekretariat
Persentase SDM UMKM yang berkualitas	4	4	4	ada	perbaharuan materi pelatihan pendampingan paska pelatihan	memadai	4	3	12	Balatkop UKM
Presentase SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya	4	4	16	ada	Pendampingan Paska Pelatihan	Memadai	3	3	9	Balatkop UKM
Persentase Wirausaha yang berkualitas	4	4	4	ada	perbaharuan materi pelatihan pendampingan paska pelatihan	memadai	3	4	12	Balatkop UKM
Presentase SDM Wirausaha yang meningkat	4	4	16	ada	perbaharuan materi pelatihan pendampingan paska pelatihan	memadai	3	4	12	Balatkop UKM

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian			Bidang/UPTD
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
pengetahuannya										
Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	4	4	16	Ada	Bimtek dan Pendampingan	Memadai	4	3	12	Restrukturisasi dan Pembiayaan
Presentase UMKM yang mengalami peningkatan tenaga kerja	4	4	16	Ada	Sosialisasi dan Pendampingan	Memadai	2	2	4	Restrukturisasi dan Pembiayaan
Proporsi Akses Kredit bagi UMKM	4	4	16	Ada	Sosialisasi dan Pendampingan	Memadai	2	3	6	Restrukturisasi dan Pembiayaan
	4	4	16	Ada	- Menetapkan standar format data dan SOP yang sama untuk seluruh kabupaten/kota. - Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi operator/pengelola data di daerah. - Monitoring dan validasi rutin (crosscheck) oleh tim provinsi, termasuk uji acak sampel data. - Pemanfaatan sistem terintegrasi (misalnya SIDT Kemenkop) untuk meminimalkan kesalahan manual.	Memadai	2	3	6	Restrukturisasi dan Pembiayaan

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian			Bidang/UPTD
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	4	4	16	ada	Meningkatkan kinerja UMKM Non Pertanian dalam mengembangkan usaha	memadai	3	4	12	Sekretariat
Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	4	4	16	Ada	Fasilitasi Promosi, pemasaran, dan pengembangan produksi	Memadai	4	3	12	Bina Usaha dan Pemasaran
Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi produksi usahanya	4	4	16	Ada	Identifikasi UMKM yang memiliki komitmen dalam mengikuti pelatihan	Memadai	4	3	12	Bina Usaha dan Pemasaran
Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi pemasaran dan jaringan usahanya	4	4	16	Ada	Meningkatkan standar kualitas produk dan sertifikasi usaha	Memadai	4	3	12	Bina Usaha dan Pemasaran

C. Penetapan Risiko Prioritas

Lampiran 4.3
Penetapan Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Bidang/UPTD
1	2	3	4	5	6
Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	12	Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng	Munculnya dinamika dalam perekonomian.	Dinamika perekonomian seperti perubahan minat konsumen, keterbasan produksi, dan jaringan pemasaran yang kurang optimal.	Sekretariat
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	12	Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng	Petugas data di Kab./Kota masih belum memahami perhitungan Volume Usaha Koperasi.	Ditetapkannya Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024 memberikan wawasan baru bagi seluruh petugas data dalam menghitung Volume Usaha Koperasi yang selama ini berbeda. Hal ini berdampak pada perhitungan data yang menjadi bias.	Sekretariat
Persentase koperasi berkualitas	15	Kepala Bidang Pengawasan	banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan prinsip dan jatidiri koperasi dalam pengelolaan usahanya	banyaknya koperasi yang tidak dapat memenuhi standar koperasi sehat dan memicu munculnya berbagai permasalahan koperasi	Pengawasan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Bidang/UPTD
1	2	3	4	5	6
Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	9	Kepala Bidang Pengawasan	masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan koperasi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan koperasi	Beberapa rekomendasi pemeriksaan kesehatan tidak dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pengurus/pengelola koperasi karena satu dan lain hal, sehingga menyebabkan penyimpangan yang terjadi menjadi temuan berulang dan berdampak pada progres peningkatan kualitas kinerja dan kepatuhan koperasi terhadap regulasi yang berlaku.	Pengawasan
Presentase koperasi yang telah dilakukan pengawasan	12	Kepala Bidang Pengawasan	Penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai kondisi riil koperasi	Pemeriksaan kesehatan koperasi bertumpu pada informasi yang disampaikan dan data dukung yang disajikan oleh pengurus, apabila terdapat ketidaksesuaian antara hal tersebut dengan kondisi riil koperasi, maka hasil pemeriksaan kesehatan koperasi, termasuk predikat kesehatan yang diperoleh, menjadi tidak akurat.	Pengawasan
Persentase koperasi provinsi produktif	12	Kepala Bidang Kelembagaan	Adanya Permasalahan Manajerial dan Keuangan dalam Koperasi	Permasalahan Manajerial dapat berupa Pengurus tidak memahami cara pengelolaan kelembagaan Koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Permasalahan Keuangan dapat berupa Pengurus tidak memahami pengelolaan usaha Koperasi, sehingga Koperasi mengalami penurunan omzet usaha	Kelembagaan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Bidang/UPTD
1	2	3	4	5	6
Presentase pertumbuhan modal Koperasi	9	Kepala Bidang Kelembagaan	Kurangnya pemahaman Pengurus/Pengelola Koperasi dalam Manajemen Produksi Usaha Koperasi, sehingga dapat mempengaruhi keuangan dan biaya operasional dalam produksi	Koperasi mengalami penurunan volume usaha produksi	Kelembagaan
Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	9	Kepala Bidang Kelembagaan	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Perkoperasian	Kurangnya Minat Masyarakat untuk Bergabung dengan Koperasi, Kurangnya Partisipasi Anggota Koperasi,	Kelembagaan
Persentase SDM Koperasi yang Berkualitas	12	Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM	1. Kurangnya kesadaran Koperasi untuk mengikutsertakan Pengelola/Pengurus/Pengawas dalam program pelatihan 2. Peserta tidak mampu menerapkan ilmu yang didapat selama pelatihan	Kinerja Koperasi tidak maksimal yang memuncullkan resiko kesalahan dan pemyelewengan dalam pengelolaan Koperasi serta tingkat kepercayaan Masyarakat kepada Koperasi menurun dengan kurangnya kualitas SDM Koperasi	Balatkop UKM
Presentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya (nilai post test dibandingkan nilai pre test)	9	Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM	1. Kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti program Pelatihan 2. Minimnya Minat peserta dalam mengikuti pelatihan 3. Materi, metode pembelajaran dan narasumber yang tidak sesuai	Kinerja Koperasi tidak maksimal karena tidak meningkatnya pengetahuan SDM Pengelola/Pengurus/Pengawas Koperasi pasca pelatihan sehingga menyebabkan menurunya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi serta daya saing Koperasi yang rendah. Tidak efektifnya pola dan hasil pelatihan yang dilaksanakan	Balatkop UKM
Rasio Kewirausahaan Daerah	12	Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng	Perkembangan kewirausahaan di Jawa Tengah belum optimal.	Dinamika perekonomian secara global dapat berdampak kepada	Sekretariat

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Bidang/UPTD
1	2	3	4	5	6
				menurunnya minat masyarakat dalam berwirausaha.	
Persentase SDM UMKM yang berkualitas	12	Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM	1. Kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti program Pelatihan 2. Materi, metode pembelajaran dan narasumber yang belum optimal	kurang optimalnya perkembangan usaha	Balatkop UKM
Presentase SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya	9	Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM	rendahnya implementasi materi paska pelatihan	kurang optimalnya perkembangan usaha	Balatkop UKM
Persentase Wirausaha yang berkualitas	12	Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM	1. Kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti program Pelatihan 2. Materi, metode pembelajaran dan narasumber yang belum optimal	kurang optimalnya perkembangan usaha	Balatkop UKM
Presentase SDM Wirausaha yang meningkat pengetahuannya	12	Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM	rendahnya implementasi materi paska pelatihan	kurang optimalnya usaha	Balatkop UKM
Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	12	Kepala Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	Kurangnya profesionalisme SDM UMKM	Kesulitan dalam mengembangkan usaha	Restrukturisasi dan Pembiayaan
Presentase UMKM yang mengalami peningkatan tenaga kerja	4	Kepala Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	Penerbitan sertifikat yang tidak sesuai SOP	Rentan terkena permasalahan Hukum dan kepercayaan konsumen terkait legalitas Usaha	Restrukturisasi dan Pembiayaan
Proporsi Akses Kredit bagi UMKM	6	Kepala Bidang Restrukturisasi dan	- Rendahnya minat dan kesadaran pelaku UMKM akan	- Materi tidak terserap dengan baik	Restrukturisasi dan Pembiayaan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak	Bidang/UPTD
1	2	3	4	5	6
		Pembiayaan	pentingnya literasi keuangan dan pencatatan digital - Keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi	- UMKM tetap kesulitan mengakses pembiayaan karena pencatatan tidak tertib - Citra program menjadi kurang efektif	
	6		- Ketidaksesuaian format atau standar input data antar kab/kota - Keterbatasan kapasitas SDM pengelola data - Kurangnya koordinasi dan pemantauan rutin	- Menghambat pengambilan keputusan yang tepat terkait kebijakan dan program UKM - Menurunnya kepercayaan stakeholder terhadap kualitas data - Duplikasi atau ketidaksesuaian intervensi program	Restrukturisasi dan Pembiayaan
Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	12	Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng	UMKM Non Pertanian masih banyak yang terkendala dalam mengembanganken usahanya	Pemberdayaan UKM di Jawa Tengah belum diklasifikasi terpisah antara UKM Pertanian dan UKM Non Pertanian.	Sekretariat
Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	12	Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran	Rendahnya komitmen peserta dalam mempraktekkan materi pelatihan	Pengembangan UMKM kurang optimal	Bina Usaha dan Pemasaran
Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi produksi usahanya	12	Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran	Rendahnya komitmen peserta dalam mempraktekkan materi pelatihan	Pengembangan usaha kurang optimal	Bina Usaha dan Pemasaran
Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi pemasaran dan jaringan usahanya	12	Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran	Keterbatasan dalam memenuhi standar kualitas dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk pasar yang lebih besar.	Sulitnya meningkatkan skala usaha akibat keterbatasan akses ke pasar potensial.	Bina Usaha dan Pemasaran

D. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Lampiran 4.4
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB tidak dapat optimal.	12	Munculnya dinamika dalam perekonomian.	Dinamika perekonomian seperti perubahan minat konsumen, keterbasan produksi, dan jaringan pemasaran yang kurang optimal.	Meningkatkan motivasi bagi Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kinerja usaha.	Sekretariat	Tahun 2025 - 2029
Sasaran								
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Terjadi perbedaan pemahaman dalam menghitung Volume Usaha Koperasi	12	Petugas data di Kab./Kota masih belum memahami perhitungan Volume Usaha Koperasi.	Ditetapkannya Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024 memberikan wawasan baru bagi seluruh petugas data dalam menghitung Volume Usaha Koperasi yang selama ini berbeda. Hal ini berdampak pada perhitungan data yang menjadi bias.	Melakukan sosialisasi serta pendampingan bagi petugas data serta gerakan Koperasi dan memahami perhitungan volume usaha Koperasi, serta meningkatkan kinerja usaha Koperasi di Jawa Tengah	Sekretariat	Tahun 2025 - 2029
Program								

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	masih banyaknya koperasi yang tidak mematuhi peraturan perkoperasian yang berlaku	15	banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan prinsip dan jatidiri koperasi dalam pengelolaan usahanya	banyaknya koperasi yang tidak dapat memenuhi standar koperasi sehat dan memicu munculnya berbagai permasalahan koperasi	Mengoptimalkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan koperasi	Pengawasan	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	rekomendasi pemeriksaan kesehatan yang tidak ditindaklanjuti oleh koperasi	9	masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan koperasi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan koperasi	Beberapa rekomendasi pemeriksaan kesehatan tidak dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pengurus/pengelola koperasi karena satu dan lain hal, sehingga menyebabkan penyimpangan yang terjadi menjadi temuan berulang dan berdampak pada progres peningkatan kualitas kinerja dan kepatuhan koperasi terhadap regulasi yang berlaku.	Mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan Koperasi serta memberikan sosialisasi mengenai kepatuhan Koperasi sesuai regulasi yang berlaku.	Pengawasan	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase koperasi yang telah dilakukan pengawasan	Kebenaran data dukung yang disajikan pengurus/pengelola koperasi	12	Penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai kondisi riil koperasi	Pemeriksaan kesehatan koperasi bertumpu pada informasi yang disampaikan dan data dukung yang disajikan oleh pengurus, apabila terdapat ketidaksesuaian antara hal tersebut dengan kondisi riil koperasi, maka hasil pemeriksaan kesehatan koperasi, termasuk predikat kesehatan yang diperoleh, menjadi tidak akurat.	Mengoptimalkan kinerja penggalian data dan bukti dukung pemeriksaan kesehatan koperasi	Pengawasan	Tahun 2025 - 2029
Program								

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi provinsi produktif	Masih Rendahnya Koperasi Aktif di Jawa Tengah yang Melaksanakan dan Melaporkan RAT	12	Adanya Permasalahan Manajerial dan Keuangan dalam Koperasi	Permasalahan Manajerial dapat berupa Pengurus tidak memahami cara pengelolaan kelembagaan Koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Permasalahan Keuangan dapat berupa Pengurus tidak memahami pengelolaan usaha Koperasi, sehingga Koperasi mengalami penurunan omzet usaha	Sinergi dengan satgas pengawas Koperasi dalam sosialisasi kepatuhan bagi Koperasi.	Kelembagaan	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase pertumbuhan modal Koperasi	Kurangnya efisien pengelolaan operasional dan manajemen keuangan	9	Kurangnya pemahaman Pengurus/ Pengelola Koperasi dalam Manajemen Produksi Usaha Koperasi, sehingga dapat mempengaruhi keuangan dan biaya operasional	Koperasi mengalami penurunan volume usaha produksi	Melakukan pembinaan bagi Koperasi sektor produksi dalam mengembangkan usahanya dalam permodalan koperasi	Kelembagaan	Tahun 2025 - 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Jumlah Anggota Koperasi Mengalami Penurunan	9	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Perkoperasian	Kurangnya Minat Masyarakat untuk Bergabung dengan Koperasi, Kurangnya Partisipasi Anggota Koperasi,	Memberikan fasilitasi dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha untuk berkoperasi	Kelembagaan	Tahun 2025 - 2029
Program								
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Berkualitas	Rendahnya pemahaman dan pengetahuan Pengelola/Pengurus/Pengawas Koperasi	12	1. Kurangnya kesadaran Koperasi untuk mengikutsertakan Pengelola/Pengurus/Pengawas dalam program pelatihan 2. Peserta tidak mampu menerapkan ilmu yang didapat selama pelatihan	Kinerja Koperasi tidak maksimal yang memuncullkan resiko kesalahan dan pemyelewengan dalam pengelolaan Koperasi serta tingkat kepercayaan Masyarakat kepada Koperasi menurun dengan kurangnya kualitas SDM Koperasi	memberikan fasilitas program peningkatkan pengetahuan dan Kompetensi SDM Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi melalui pelatihan dengan seleksi dan komitmen dari peserta pelatihan	Balatkop UKM	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya (nilai post test dibandingkan nilai pre test)	Rendahnya jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya pasca pelatihan dan minimnya implementasi materi/ilmu yang didapat pasca	9	1. Kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti program Pelatihan 2. Minimnya Minat peserta dalam mengikuti	Kinerja Koperasi tidak maksimal karena tidak meningkatnya pengetahuan SDM Pengelola/Pengurus/Pengawas Koperasi pasca	Menyelenggarakan pelatihan dengan tema-tema materi yang menarik dalam kerangka program pelatihan : 1. Manajerial	Balatkop UKM	Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pelatihan		pelatihan 3. Materi, metode pembelajaran dan narasumber yang tidak sesuai	pelatihan sehingga menyebabkan menurunya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi serta daya saing Koperasi yang rendah. Tidak efektifnya pola dan hasil pelatihan yang dilaksanakan	Bagi Koperasi 2. Kompetensi Bagi Koperasi 3. Perkoperasian bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Menyiapkan materi, metode pembelajaran dan narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi		
Sasaran								
Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Jawa Tengah	Rasio Kewirausahaan Daerah	Adanya potensi pertumbuhan kewirausahaan yang menurun.	12	Perkembangan kewirausahaan di Jawa Tengah belum optimal.	Dinamika perekonomian secara global dapat berdampak kepada menurunnya minat masyarakat dalam berwirausaha.	Koordinasi dengan seluruh *stakeholder* untuk memfasilitasi masyarakat yang berminat dalam berwirausaha	Sekretariat	Tahun 2025 - 2029
Program								
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,	Persentase SDM UMKM yang berkualitas	rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM UMKM	12	1. Kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti program	kurang optimalnya perkembangan usaha	Optimalisasi pelaksanaan pelatihan melalui penyesuaian	Balatkop UKM	Tahun 2025 - 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dan Usaha Mikro (UMKM)				Pelatihan 2. Materi, metode pembelajaran dan narasumber yang belum optimal		materi, metode pembelajaran, dan pemilihan narasumber yang tepat.		
Kegiatan								
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Presentase SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya	rendahnya jumlah SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya	9	rendahnya implementasi materi paska pelatihan	kurang optimalnya perkembangan usaha	Review Materi dan Silabi Pelatihan, pendampingan paska pelatihan	Balatkop UKM	tahun 2025-2029
Program								
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Wirausaha yang berkualitas	rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM UMKM	12	1. Kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti program Pelatihan 2. Materi, metode pembelajaran dan narasumber yang belum optimal	kurang optimalnya perkembangan usaha	mengoptimalkan pendampingan paska pelatihan	Balatkop UKM	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								
Pemberdayaan	Presentase SDM	rendahnya	12	rendahnya	kurang	Pendampingan	Balatkop	tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Wirausaha yang meningkat pengetahuannya	jumlah SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya		implementasi materi paska pelatihan	optimalnya usaha	dan Sosialisasi oleh konsultan pendamping	UKM	
Program								
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	Rendahnya manajemen SDM UMKM	12	Kurangnya profesionalisme SDM UMKM	Kesulitan dalam mengembangkan usaha	Optimalisasi Bimtek dan Pendampingan	Restrukturisasi dan Pembiayaan	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Presentase UMKM yang mengalami peningkatan tenaga kerja	Rendahnya Kesadaran perlindungan Perizinan Berusaha produk dan legalitas usaha	4	Penerbitan sertifikat yang tidak sesuai SOP	Rentan terkena permasalahan Hukum dan kepercayaan konsumen terkait legalitas Usaha	Pendampingan oleh Konsultan UMKM Center dan PLUT Jawa Tengah	Restrukturisasi dan Pembiayaan	Tahun 2025 - 2029
	Proporsi Akses	Rendahnya	6	- Rendahnya	- Materi tidak	Melaksanakan	Restrukturis	Tahun 2025 -

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kredit bagi UMKM	partisipasi dan pemahaman UMKM terhadap materi literasi keuangan dan digitalisasi pembukuan usaha.		minat dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya literasi keuangan dan pencatatan digital - Keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi	terserap dengan baik - UMKM tetap kesulitan mengakses pembiayaan karena pencatatan tidak tertib - Citra program menjadi kurang efektif	Bimbingan Teknis dan Literasi berbasis wilayah, bekerja sama dengan pendamping lokal, dengan materi ringkas, studi kasus nyata, dan langsung mempraktikkan pencatatan keuangan digital.	asi dan Pembiayaan	2029
		Ketidakterpaduan dan ketidakakuratan data usaha kecil yang dihimpun.	6	- Ketidaksesuaian format atau standar input data antar kab/kota - Keterbatasan kapasitas SDM pengelola data - Kurangnya koordinasi dan pemantauan rutin	- Menghambat pengambilan keputusan yang tepat terkait kebijakan dan program UKM - Menurunnya kepercayaan stakeholder terhadap kualitas data - Duplikasi atau ketidaksesuaian intervensi program	Membentuk Tim Validasi Terpadu Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Tengah yang secara berkala (misalnya triwulanan) melakukan validasi dan sinkronisasi data bersama kabupaten/kota melalui sistem SIDT, didukung SOP dan template data standar.	Restrukturis asi dan Pembiayaan	Tahun 2025 - 2029
Sasaran								

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	Perkembangan UMKM Non Pertanian belum bisa tumbuh optimal	12	UMKM Non Pertanian masih banyak yang terkendala dalam mengembangankan usahanya	Pemberdayaan UKM di Jawa Tengah belum diklasifikasi terpisah antara UKM Pertanian dan UKM Non Pertanian.	Mengoptimalkan pengelolaan basis data yang optimal.	Sekretariat	
Program								
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	Rendahnya pengetahuan dan keterampilan UMKM	12	Rendahnya komitmen peserta dalam mempraktekkan materi pelatihan	Pengembangan UMKM kurang optimal	Peningkatan UMKM dalam produktivitas dan pemasaran	Bina Usaha dan Pemasaran	Tahun 2025 - 2029
Kegiatan								
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi produksi usahanya	Peserta Bimtek tidak mempraktekkan hasil bimteknya	12	Rendahnya komitmen peserta dalam mempraktekkan materi pelatihan	Pengembangan usaha kurang optimal	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui daring/luring	Bina Usaha dan Pemasaran	Tahun 2025 - 2029
	Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi pemasaran dan jaringan usahanya	Sulitnya mengakses pasar yang lebih luas karena keterbatasan kapasitas usaha.	12	Keterbatasan dalam memenuhi standar kualitas dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk pasar yang lebih besar.	Sulitnya meningkatkan skala usaha akibat keterbatasan akses ke pasar potensial.	Perluasan akses pasar dan peningkatan standar kualitas melalui bimbingan teknis, pameran, dan kemitraan	Bina Usaha dan Pemasaran	Tahun 2025 - 2029

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sekaligus tahun transisi dalam hal perencanaan pembangunan daerah mengingat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD disusun secara substansi berdasarkan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 pada tahap I dengan tema “Penguatan Landasan Transformasi”. RPJMD juga disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, serta mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. RPJMD memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, serta rekomendasi para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Dokumen ini telah diselaraskan dengan visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2029. Adapun visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2029 adalah Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk

Menuju Indonesia Emas 2045 yang didukung oleh 6 Misi, yaitu (1) Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global, (2) Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan, (3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas, (4) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif, (5) Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan, dan (6) Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. Selanjutnya, visi, misi dan program prioritas tersebut akan ditajamkan kedalam program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan tugas, pokok, serta fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan urusan penanaman modal yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator serta target kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mencakup semua kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi kedua “Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan” dan misi keenam “Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif dan integrasi.”

Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 juga mengacu pada Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2025-2029, yang memiliki visi "Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045" yang didukung dengan 2 (dua) misi, yaitu (1) Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Guna Mendukung Tercapainya Transformasi Ekonomi dan (2) Menguatkan Birokrasi Penanaman Modal yang Adaptif dan Melayani Guna Mendukung Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Penanaman Modal.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah sejalan dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta aturan pelaksanaannya, dimana Renstra PD menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Disamping itu, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Berdasarkan pendekatan tersebut, maka Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai masukan, saran, ide, dan usulan dari segenap pemangku kepentingan. Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 dan memperhatikan hasil koordinasi/ konsultasi dengan stakeholder terkait guna penyempurnaan dokumen perencanaan ini.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 221);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

23. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi Kinerja Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
38. Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 67);
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 36);
40. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2025;
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 42 Tahun 2023 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 42);
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 44);
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 13);

44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 16);
45. Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan penyelarasan terhadap kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, penyesuaian terhadap kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Renstra K/L Tahun 2025-2029, dampak perekonomian dan resesi global serta dinamika perubahan regulasi. Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 juga menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah urusan penanaman modal secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan urusan penanaman modal di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP selama lima tahun;
3. Menentukan tolak ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan penanaman modal.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan diharapkan dapat :

1. Berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel serta mempunyai sasaran yang jelas dan terukur;
2. Menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. Mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7.2.2/0002764 tanggal 9 April 2025 perihal Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : **Pendahuluan**, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II : **Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah**, berisi tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya DPMPTSP, kinerja pelayanan DPMPTSP, tantangan dan peluang pengembangan serta isu strategis pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Bab III : **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah serta rumusan strategi sebagai rangkaian tahapan yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai, termasuk Manajemen Risiko Strategis pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah, maupun sasaran program,

kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya.

Bab IV : **Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal**, berisi rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Renstra PD serta indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab V : **Penutup**, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut di atas, maka susunan organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi tersebut disajikan pada Gambar 2.1

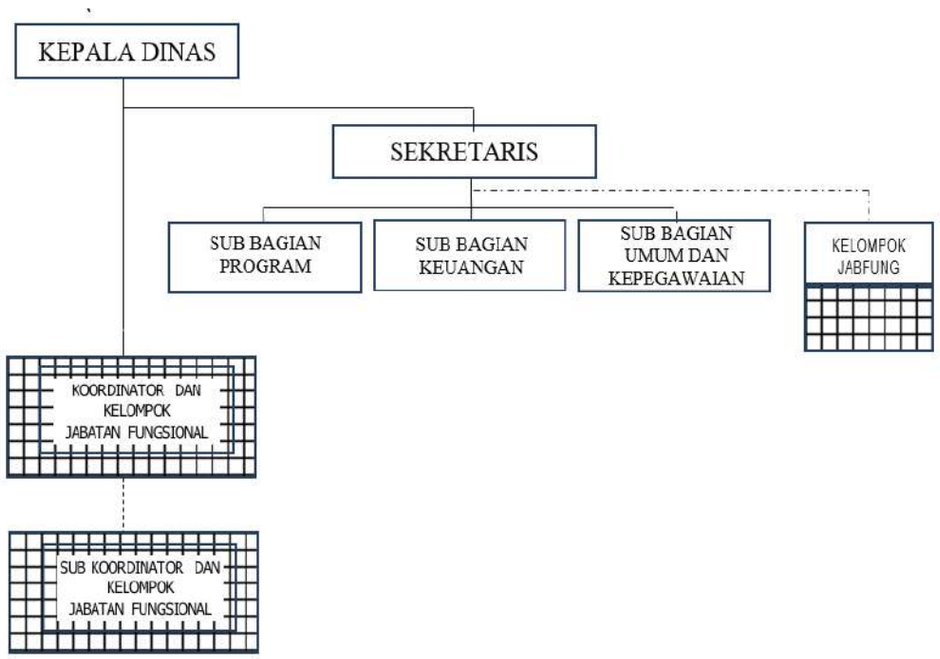

Gambar 2.1

Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

2.1.4 Uraian Tugas

(1) Kepala Dinas

Bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dengan fungsi :

a) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sekretaris Dinas

Bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas, dengan fungsi :

a) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
b) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
c) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
d) Penyiapan bahan kordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkunagan Dinas;
e) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
f) Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lngkungan Dinas;
h) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas, maka ditunjuk Pengarah dan Ketua Kelompok Kerja untuk mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang terdiri atas :

a) **Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal**

- Pengarah Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.
- Kelompok Kerja Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal, yang meliputi:

  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan penanaman modal;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang perencanaan penanaman modal;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan penanaman modal ;
  - menyiapkan bahan pengusulan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
  - menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga non pemerintah di bidang perencanaan penanaman modal;
  - menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal; dan
  - melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Kelompok Kerja Pengkajian, Pengembangan Potensi dan Kewilayahan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, pengembangan potensi dan kewilayahan, yang meliputi:
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian, pengembangan potensi dan kewilayahan;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengkajian, pengembangan potensi dan kewilayahan;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengkajian, pengembangan potensi dan kewilayahan;
  - menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan potensi serta peluang investasi daerah;
  - menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga non pemerintah di bidang pengkajian, pengembangan potensi dan kewilayahan;
  - menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, pengembangan potensi dan kewilayahan;
  - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Kelompok Kerja Promosi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, yang meliputi :
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang promosi;

- menyiapkan bahan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- menyiapkan bahan perumusan, menyusun materi, menetapkan sasaran promosi, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi;
- menyiapkan bahan penyelenggaraan serta berpartisipasi pada kegiatan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri;
- menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan penyiapan data kebutuhan calon investor hasil promosi dalam dan luar negeri;
- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan promosi dan pengembangan promosi lintas sektor, kabupaten/kota dan pemerintah;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi; dan
- melaksanakan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Kelompok Kerja Pembinaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, yang meliputi:
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pembinaan;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan calon investor serta berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan calon investor dan koordinasi

tindaklanjut terhadap kepeminatan investasi lintas sektor, lintas kabupaten/kota dan Pemerintah;

- menyiapkan bahan monitoring progres kepeminatan investasi;
- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pertemuan calon investor dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Kelompok Kerja Pemberdayaan Usaha, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha, yang meliputi:
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha;
  - menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan investasi skala besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah dengan lintas sektor, kabupaten/kota dan pemerintah;
  - menyiapkan bahan identifikasi fasilitasi kemitraan lintas sektor di dalam dan luar negeri;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha skala besar, menengah dan kecil dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal;
  - menyiapkan bahan monitoring fasilitasi kemitraan usaha skala besar, menengah dan kecil;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kemitraan lintas sektor, kabupaten/kota dan pemerintah;

- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

b) **Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Layanan**

- Pengarah Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pelayanan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pada pelayanan perizinan, pengaduan dan peningkatan layanan.
- Kelompok Kerja Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pelayanan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pada administrasi perizinan bidang pembangunan, yang meliputi :
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada administrasi perizinan bidang pembangunan;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis pada administrasi perizinan bidang pembangunan;
  - menyiapkan bahan pembinaan perizinan bidang pembangunan;
  - menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan perizinan bidang pembangunan;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pembangunan;
  - menyiapkan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan perizinan sektor pembangunan yang meliputi: pekerjaan umum, pengelolaan sumber daya air, perhubungan dan komunikasi dan informatika, perikanan dan kelautan, pariwisata, dan kearsipan;

- menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dan pelayanan perizinan meliputi: pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan bidang pembangunan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian konsultasi pelayanan perizinan bidang pembangunan;
- menyiapkan bahan pengawasan pengadministrasian pelayanan perizinan bidang pembangunan;
- menyiapkan bahan pengoordinasian pelayanan perizinan lintas sektor, kabupaten/kota dan pemerintah bidang pembangunan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan bidang pembangunan;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada administrasi perizinan bidang pembangunan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Kelompok Kerja Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pelayanan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pada administrasi perizinan bidang perekonomian, yang meliputi:
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada administrasi perizinan bidang perekonomian;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis pada administrasi perizinan bidang perekonomian;
  - menyiapkan bahan pembinaan perizinan bidang perekonomian;
  - menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan perizinan bidang perekonomian;

- menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis persyaratan dasar perizinan;
- menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan perizinan sektor perekonomian yang meliputi penanaman modal, tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dan pelayanan perizinan meliputi: pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan bidang perekonomian;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian konsultasi pelayanan perizinan bidang perekonomian;
- menyiapkan bahan pengawasan pengadministrasian pelayanan perizinan bidang perekonomian;
- menyiapkan bahan pengoordinasian pelayanan perizinan lintas sektor, kabupaten/kota dan pemerintah bidang perekonomian;
- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan bidang perekonomian;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada administrasi perizinan bidang perekonomian; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

- Kelompok Kerja Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pelayanan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pada administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan, yang meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis pada administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- menyiapkan bahan pembinaan perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- menyiapkan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan perizinan sektor kesejahteraan rakyat dan lingkungan yang meliputi kesatuan bangsa dan politik, sosial, pendidikan, kesehatan, kehutanan, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral;
- menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dan pelayanan perizinan meliputi: pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian konsultasi pelayanan perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- menyiapkan bahan pengawasan pengadministrasian pelayanan perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- menyiapkan bahan pengoordinasian pelayanan perizinan lintas sektor, kabupaten/kota dan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;

- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan dan peningkatan layanan, yang meliputi :
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan peningkatan layanan;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengaduan dan peningkatan layanan;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian informasi, konsultasi dan pengaduan perizinan;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian pendampingan advokasi dan konsultasi pelayanan serta penanganan pengaduan;
  - Menyiapkan bahan laporan pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pelayanan konsultasi perizinan dan penanganan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - menyiapkan bahan pengelolaan dan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
  - menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan hasil survey kepuasan masyarakat;

- menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan perizinan dan penanganan pengaduan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah teknis, lintas kab/kota dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
- menyiapkan bahan penyuluhan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan;
- menyiapkan bahan evaluasi kinerja pelayanan publik;
- menyiapkan bahan analisa data pelayanan perizinan;
- menyiapkan bahan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- menyiapkan bahan evaluasi pelaporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten/kota;
- menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan mal pelayanan publik kabupaten/kota;
- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis di bidang penanganan pengaduan dan peningkatan layanan;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan dan peningkatan layanan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) **Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal dan Pengelolaan Data Informasi**

- Pengarah Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal dan Pengelolaan Data Informasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan,

pengendalian penanaman modal dan pengelolaan data informasi.

- Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian, yang meliputi:
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
  - menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  - menyiapkan bahan penyusunan bahan kebijakan pedoman dan standar operasional pengawasan;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penanaman modal;
  - menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan kendala penanaman modal;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian tindaklanjut hasil pengendalian lintas sektor, kabupaten/kota dan pemerintah;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah;
  - menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
  - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi, yang meliputi :
  - menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  - menyiapkan bahan penyusunan pedoman standar operasional monitoring dan evaluasi;
  - menyiapkan bahan analisa data perusahaan;
  - menyiapkan bahan pengoordinasian tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi lintas sektor, kabupaten/kota dan pemerintah;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan di bidang monitoring dan evaluasi serta berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah;
  - menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Kelompok Kerja Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan pengembangan sistem informasi, yang meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan sistem informasi;
- menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan sistem informasi;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data perizinan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian informasi dan publikasi di bidang pengolahan data dan pengembangan sistem informasi;
- menyiapkan bahan pelayanan informasi bidang pengolahan data dan pengembangan sistem informasi;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan pelayanan informasi bidang pengolahan data dan informasi;
- menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi data perizinan;
- menyiapkan bahan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi penanaman modal dan perizinan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis di bidang pengembangan sistem informasi;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional msing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya DPMPTSP Provinsi Jateng

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai di lingkungan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah per 30 Juni 2025 sebanyak 91 orang terdiri dari :

Tabel 2.1.
Sumber Daya Manusia DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

NO	GOL	PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN																TOTAL
		SD		SLTP		SLTA		DI/D3		D4		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II	-	-	-	-	4	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9
3	III	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	18	13	4	7	-	-	52
4	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	-	-	14
5	IX (PPPK)	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	8	6	-	-	-	-	16
Jml		0	0	0	0	7	1	1	4	0	8	26	19	9	16	0	0	**91**

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

Keterangan :

1. Pejabat Struktural Eselon IIA sebanyak 1 orang, eselon IIIA sebanyak 1 orang, dan eselon IVA sebanyak 3 orang.
2. Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya 2 orang, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya 2 orang, Penata Perizinan Ahli Muda 4 orang, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda 7 orang dan Analis Kebijakan Ahli Muda sebanyak 1 orang.
3. Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama sebanyak 4 orang.
4. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama sebanyak 17 orang.
5. Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda sebanyak 1 orang.
6. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 1 orang.
7. Jabatan fungsional baik pustakawan, arsiparis, dan fungsional perencanaan belum ada. Namun tugas-tugas kepustakaan, kearsipan dan perencanaan dilakukan sebagaimana tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

2.2.2. Aset

Aset yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Daftar Aset DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

No.	Uraian	Kondisi Barang Saat ini		Keterangan
		Volume	Nilai (Rp)	
1.	ASET LANCAR			
	Persediaan	5.263,00	36.292.878,00	
2.	ASET TETAP			
	1. Tanah	1,00	8.300.000.000,00	Luas 3.320 m^2 (Sertifikat HP No.2)
	2. Peralatan dan Mesin	1.358,00	12.213.814.482,00	
	3. Gedung dan Bangunan	4,00	7.601.594.985,00	Luas 2.039,36 m^2
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	2,00	91.538.873,00	
	5. Aset Tetap Lainnya	1.642,00	135.443.600,00	
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00	72.915.700,00	
	7. Akumulasi Penyusutan	0,00	14.889.343.104,93	
3.	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	
	2. Aset Tidak Berwujud	5,00	616.930.830,00	
	3. Aset Lain-lain	7,00	432.290.000,00	
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	571.559.404,66	
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	432.290.000,00	

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Penanaman Modal merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan pasal 30 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan urusan Penanaman Modal apabila mendapatkan pelimpahan mengenai penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkup lintas kabupaten/kota dan atau pelimpahan dari pemerintah yang ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam mendukung penyelenggaraan urusan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Kinerja pelayanan tersebut diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik agar pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2.3.1. Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024

Kinerja pelayanan pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja seperti terlihat pada Tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																			
1	Tujuan																			
	Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal	%				4	4	4	4	-	-5.8	6,56	4,40	12,59	-	-68.97	164	110	125,90	-
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%				80	80	80	80	-	81.06	87,15	88,67	88,89	-	101,33	108,94	110,84	111,11	-
2	Sasaran																			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%				90	90	90	90	-	89,28	94,23	94,28	94,14	-	99,2	104,7	104,76	104,6	-
	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%				100	100	100	100	-	202	111,71	104,38	117,23	-	202,2	111,71	104,38	117,23	-
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%				80	80	80	80	-	81.06	80,08	83,06	83,65	-	101,33	100,1	103,83	104,56	-
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	%				72	73	73	80	-	79.34	80,77	82,01	87,6	-	110,19	110,64	112,34	109,5	-
3	Program																			
	Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan	%				65	70	100	100	-	65	80	100	100	-	100	114,29	100	100	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Rasio jumlah ijin usaha dan / atau izin komersial / izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal	%				10	10	8	24	-	20,29	29,72	8,99	33,78	-	202,9	297,2	112,38	140,75	-
	Rasio jumlah realisasi kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM	%				10	10	20	26	-	12	10	20	26,32	-	120	100	100	101,23	-
	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%				92	93	94	95	-	98,71	94,67	99,60	99,80	-	107,29	101,8	105,96	105,05	-
	Persentase pemenuhan standar pelayanan	%				90	91	92	93	-	98	100	100	100	-	108,89	109,89	108,70	100	-
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%				100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Persentase realisasi proyek penanaman modal	%				15	15	15	15	-	35,44	82,07	16,66	29	-	236,27	547,13	111,07	193,33	-
	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan	%				60	60	80	90	-	118,33	114,19	104,53	92,25	-	197,22	190,32	130,66	102,5	-
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
B	**Renstra PD Tahun 2024-2026**																			
1	Tujuan																			
	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%				-	-	-	-	4	-	-	-	-	14,83	-	-	-	-	370,75
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka				-	-	-	-	83	-	-	-	-	85,37	-	-	-	-	102,86
2	Sasaran																			
	Persentase realisasi PMA dan PMDN	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	110,41	-	-	-	-	110,41

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka				-	-	-	-	90	-	-	-	-	97,13	-	-	-	-	107,92
	Indeks Manajemen Risiko	Angka				-	-	-	-	3	-	-	-	-	2,96	-	-	-	-	98,67
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka				-	-	-	-	80	-	-	-	-	85,14	-	-	-	-	106,43
3	Program																			
	Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	%				-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100
	Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	%				-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100
	Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	%				-	-	-	-	46	-	-	-	-	46,38	-	-	-	-	100,83
	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%				-	-	-	-	90	-	-	-	-	99,8	-	-	-	-	110,89
	Persentase pemenuhan standar pelayanan	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%				-	-	-	-	20	-	-	-	-	42,38	-	-	-	-	211,90
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%				-	-	-	-	10	-	-	-	-	11,7	-	-	-	-	117
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%				-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, indikator tujuan dan sasaran dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator tujuan dapat melampaui target, yaitu indikator pertumbuhan nilai penanaman modal dan indeks reformasi birokrasi. Realisasi investasi mulai meningkat seiring dengan kemudahaan berusaha yang terus digalakkan mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/ kota. Optimalisasi sistem OSS RBA yang dapat diakses dari manapun dan kapanpun serta berdirinya Mal Palayanan Publik di 35 Kabupaten/ Kota ikut berpartisipasi mendukung peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal.

Disisi lain, upaya DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi masif dilakukan dalam rangka mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Perbaikan tata kelola mulai dari manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas layanan publik termasuk menciptakan inovasi layanan sehingga Indeks Reformasi Birokrasi juga turut meningkat.

Namun demikian, terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang belum mencapai taget yang telah ditetapkan, yaitu Indeks Manajemen Risiko, yang tercapai sebesar 2,96 dari target 3,0. Hal ini menunjukkan masih perlu upaya pengendalian risiko atas pelaksanaan program kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan nilai penanaman modal yang meningkat menunjukkan bahwa Jawa Tengah menjadi primadona para investor. Perkembangan nilai penanaman modal PMA dan PMDN tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4.
Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal PMDN dan PMA
Tahun 2020-2024

Tahun		Nilai Penanaman modal (Rp Trilyun)			Pertumbuhan Nilai Penanaman modal (PMA dan PMDN) (%)
	PMA	PMDN		Jumlah	
		LKPM	Non LKPM		
2020	19,63	30,61	5,83	56,07	-5,8
2021	21,4	31,31	7,08	59,79	6,56
2022	33,9	24,99	9,52	68,41	14,4
2023	23,14	32,98	20,9	77,02	12,59
2024	35,37	33,3	19,77	88,44	14,83

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan nilai penanaman modal mengalami fluktuatif. Namun demikian, total realisasi investasinya terus meningkat dari tahun 2020 sampai 2024. Hal ini disebabkan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan peningkatan kepatuhan tersebut karena semakin masifnya pengawasan PMA/PMDN, pendampingan LKPM, dan bimbingan teknis yang dilaksanakan. Selain pendampingan LKPM secara langsung, juga dilaksanakan pendampingan secara virtual setiap awal minggu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 42 Tahun 2023 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mencatat angka realisasi investasi UMK yang bernilai Rp 1 Miliyar ke bawah. Realisasi investasi UMK perlu dicatat karena besaran nilai tersebut tidak wajib dilaporkan melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Meskipun realisasinya kecil, namun jumlahnya signifikan dan mempengaruhi perekonomian daerah.

Peningkatan realisasi investasi juga dapat dimaknai bahwa Jawa Tengah memiliki prospek dan daya tarik bagi para investor seiring dengan peningkatan dukungan infrastruktur, penetapan upah tenaga kerja yang kompetitif, dan rencana pembangunan kawasan industri di beberapa daerah, serta pelayanan perizinan baik provinsi maupun kabupaten/kota yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel. Selain itu, komitmen pemerintah daerah melalui

kebijakan pro investasi juga menjadi katalisator dalam mempercepat calon investor merealisasikan kegiatan usahanya.

Peningkatan realisasi diatas tentu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah proyek. Jumlah proyek penanaman modal di Jawa Tengah pada tahun 2020-2024 terus meningkat. Jumlah proyek PMA PMDN yang melaporkan LKPM sempat menurun pada tahun 2022 karena transisi sistem LKPM yang terintegrasi dalam OSS RBA. Adapun rincian jumlah proyek PMA PMDN pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Jumlah Proyek PMDN dan PMA
Berdasarkan LKPM Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Proyek		
	PMA	PMDN	Jumlah
2020	2.889	8.823	11.712
2021	3.141	18.184	21.325
2022	3.087	16.287	19.374
2023	7.032	36.048	43.080
2024	11.289	54.526	65.815

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

Peningkatan jumlah proyek penanaman modal diatas juga mempengaruhi serapan tenaga kerja. Jumlah proyek dan tenaga kerja yang terserap oleh PMA dan PMDN pada tahun 2020-2024 juga terus meningkat. Peningkatan jumlah ini banyak disumbang dari PMA dan PMDN yang tergolong industri padat karya seperti industri alas kaki, industri tekstil dan produk tekstil. Penyerapan tenaga kerja berdasarkan LKPM dapat dijelaskan pada tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6.
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan LKPM
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah tenaga kerja PMDN	71.014	86.269	91.644	158.391	158.468
Jumlah tenaga kerja PMA	99.022	130.204	124.131	122.252	252.545
Total	170.096	216.473	215.775	280.643	411.013

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa infrastruktur juga mempengarungi perkembangan investasi, termasuk adanya kawasan industri. Kawasan industri merupakan salah satu faktor pendukung dalam perkembangan investasi di Jawa Tengah. Berikut merupakan sebaran kawasan industri yang ada di Jawa Tengah.

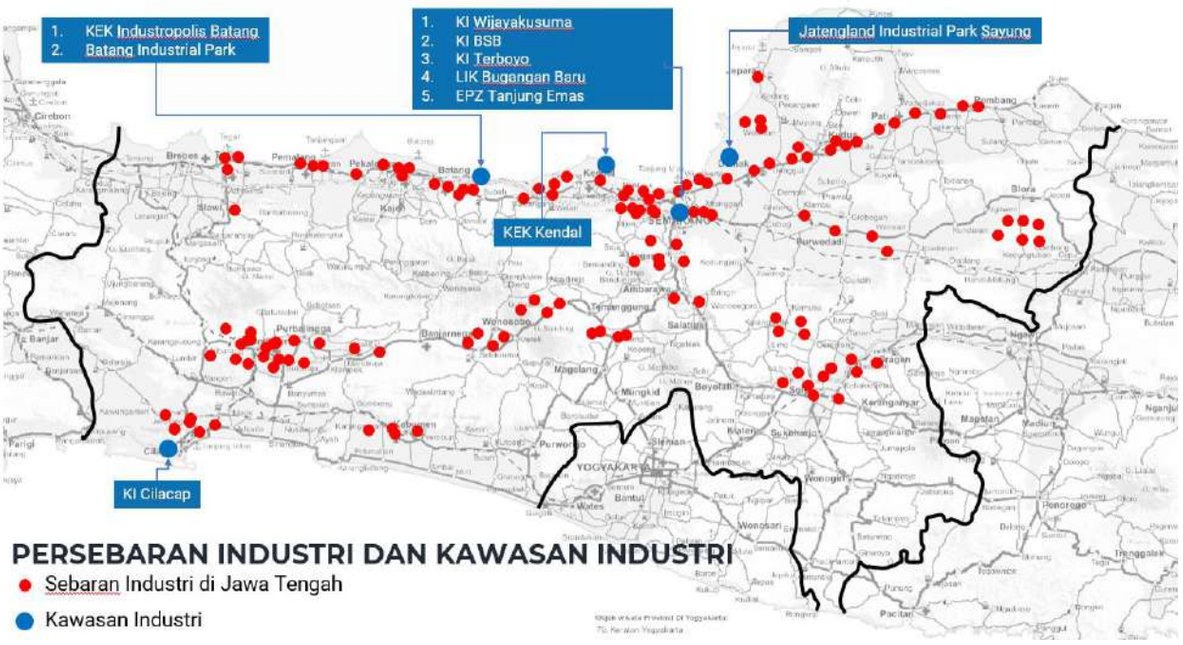

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.2.

Kawasan Industri Di Jawa Tengah

Kawasan industri banyak tersebar di wilayah utara Jawa Tengah, sedangkan untuk kawasan peruntukan industri hampir menyebar di Jawa Tengah. Sebaran kawasan industri tersebut mendominasi wilayah utara Jawa Tengah karena kemudahan aksesibilitas berupa jalan tol dan pelabuhan untuk mempermudah arus logistik bahan baku dan distribusi barang. Berikut beberapa kawasan industri yang berpotensi untuk dikembangkan di Jawa Tengah.

Tabel 2.7.
Data Kawasan Industri di Jawa Tengah

No.	Nama Kawasan Industri	Pengelola	Total Luas	Lahan Digunakan	Lahan Tersedia	Jumlah Tenant
1.	Kawasan Industri Kendal (Kawasan Ekonomi Khusus)	PT. Kawasan Industri Kendal	1.000 Ha	933 Ha	43 Ha	117
2.	KEK Industropolis Batang	PT. Kawasan Industri Terpadu Batang	3100 Ha	339 Ha	150 Ha (Fase 2)	28
3.	Batang Industrial Park	PT. Perkebunan dan Industri Segajung	287 Ha	99 Ha	4.2 Ha (3 kavling)	14
4.	Jatengland Industrial Park Sayung	PT. Jawa Tengah Lahan Andalan	300 Ha	172.29 Ha	100 Ha	21
5.	Kawasan Industri Wijayakusuma	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	266 Ha	115 Ha	52,8 Ha	138
6.	BSB Industrial Park	PT. Karyadeka Alam Lestari	112 Ha	72,56 Ha	2,6 Ha (area yang ditawarkan) tidak dalam 1 hamparan	52
7.	Kawasan Industri Candi	PT. Indo Permata Usahatama	350 Ha	350 Ha	-	Blm dapat diupdate
8.	Kawasan Industri Candi	PT. Dibya Jaya Makmur	300 Ha	±300 Ha	Sisa beberapa ribu M2 tetapi bukan satu hamparan	Blm dapat diupdate

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa peluang pengembangan industri yang masuk dalam kawasan masih cukup besar. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dan KEK Industropolis Batang, menjadi magnet baru bagi masuknya para investor ke Jawa Tengah. Sementara itu, pengembangan kawasan industri di Kabupaten/ Kota terus didukung oleh pemerintah melalui penyediaan sarana prasana pendukung seperti jalan yang akan menuju ke kawasan industri, penyediaan air baku, ketersediaan tenaga kerja yang berkompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri, dan lain sebagainya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menerbitkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang tindak lanjut atas Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tersebut dan

Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Tahun 2012 - 2025. Pelaksanaan pembangunan ekonomi memerlukan dukungan kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian hukum serta berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mengakomodir perkembangan regulasi perizinan, maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Adapun rekapitulasi perizinan Tahun 2020 - 2024 di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.8.
Rekapitulasi Pelayanan Perizinan Tahun 2020-2024

No	Bidang	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1	Tenaga Kerja, Transmigrasi	25	280	4.576	1.970	146	6.997
2	Koperasi dan UKM	51	17	110	-	3	181
3	Kesbangpol	14	55	68	82	70	289
4	Sosial	2	3	2	6	2	15
5	Pengelolaan Sumberdaya Air	1.450	1.258	809	1.102	-	4.619
6	Kelautan dan Perikanan	1.131	1.137	3.826	6.992	7.463	20.549
7	Ketenagalistrikan	-	205	369	193	143	910
8	Pariwisata	-	54	412	364	156	986
9	Pekerjaan Umum/Bina Marga	22	83	151	93	1.169	1.518
10	Perhubungan	486	220	440	423	75	1.644
11	Perindustrian dan Perdagangan	24	563	1.901	3.189	6.433	12.110
12	Kesehatan	98	86	175	133	33	525
13	Perkebunan	-	121	206	152	139	618
14	Peternakan dan Kesehatan Hewan	92	33	7	2	-	134
15	Lingkungan Hidup dan kehutanan	50	1.389	14.802	28.578	37.569	82.388
16	ESDM	1.535	845	619	218	40	3.257
17	Pendidikan	34	29	38	72	109	282
18	Aset Provinsi Jawa Tengah (PRPP)	512	71	-	-	-	583
	JUMLAH	5.526	6.449	28.511	43.569	53.550	137.605

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

Rekapitulasi perizinan pada tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan adanya peningkatan kualitas layanan, layanan jemput bola, penyederhanaan proses perizinan, dan penerapan OSS RBA sehingga proses perizinan yang menjadi semakin cepat, mudah, murah, dan transparan.

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah juga senantiasa melakukan inovasi dan terobosan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan. Berbagai inovasi layanan baik *IT based* maupun *non IT based* terus dikembangkan. Inovasi yang bersifat *IT based* tidak hanya berorientasi pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mendukung kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan tugas adminitrasi di lingkungan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan sistem ini terus dikembangkan guna menjawab tuntutan masyarakat dan dinamika pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Inovasi *non IT based* juga dikembangkan melalui kolaborasi dengan stakeholder terkait.

Tabel 2.9.
Daftar Inovasi DPMPTSP

No.	Nama Inovasi	Fungsi
1	SIAP Jateng	Sistem aplikasi perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah
2	CJIP	Sistem aplikasi promosi investasi secara digital
3	Gerai Investasi	Service point layanan perizinan yang terdapat di 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
4	Intan	Sistem informasi data sharing antar bidang dan layanan DPMPTSP
5	E-Arsip	Sistem informasi pengelolaan arsip digital perizinan
6	SIMIKE	Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Investasi Sektor Mikro dan Kecil
7	Sibayan Lemon	Service izin bagi nelayan lewat mobil layanan keliling secara online
8	Antrian Online	Aplikasi pengambilan nomor antrian pengajuan perizinan dan layanan

		pendampingan OSS
9	SIKEREN	Sistem Pelaporan dan Penatausahaan Keuangan DPMPTSP
10	Malabar	Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah
11	Lakon-e Pandu	Layanan konsultasi secara elektronik dan pendampingan terpadu
12	Pena Si Johan	Pekan layanan sistem investasi joss dan handal
13	Trengginas	Strategi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi secara efektif dan efisien
14	SIDIK KARYO	Integrasi antara CJIP, Dapodik dan Ayo Kerja untuk mengetahui potensi dan kebutuhan tenaga kerja

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam memberikan pelayanan perizinan, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi dengan meraih Penghargaan Predikat Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah juga berhasil meraih prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2020. Dalam hal keterbukaan informasi publik, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan KIP award dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam kategori “INFORMATIF” kategori SKPD Provinsi Jawa Tengah dalam menyampaikan, menyediakan, dan menguasai informasi publik.

Selain itu, sebagai wujud kinerja nyata dalam urusan penanaman modal, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah 3 kali berturut-turut memperoleh juara I Tingkat Nasional dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) kategori Pemerintah Provinsi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI pada tahun 2018, 2021, dan 2022.

Penerimaan penghargaan tersebut, tentunya didukung oleh pelaksanaan program kegiatan dan anggaran yang tersedia secara

efektif, efisien dan akuntabel. Berdasarkan data, realisasi anggaran DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang berkualitas. Anggaran yang tersedia digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Pagu anggaran dan realisasi pendanaan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dijelaskan dalam tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp 000)					APBD pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Tahun/ Sampai dengan Tahun (Rp 000)					Rasio dan Realisasi Anggaran Tahun/ Sampai dengan Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Pendapatan	0	0	0	0	33.000.000	24.750.000	30.000.000	30.000.0000	33.000.000	33.000.000	24.750.000	30.000.000	30.000.000	33.000.000	33.000.000	100	100	100	100	100	-	-
2	Belanja	26.037.127.000	28.908.920.000	32.484.742.000	41.043.522.000	31.591.484.000	19.570.642.000	17.920.515.000	19.034.974.000	22.029.831.000	23.773.922.000	18.597.731.786	17.552.390.315	18.828.928.730	21.737.689.124	23.041.175.326	95,03	97,95	98,92	98,67	96,92	5,36	97,49
3	Pembiayaan	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		

Sumber : DPMPTSP Prov. Jateng, 2025

Berdasarkan data anggaran dan realisasi anggaran diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pagu anggaran DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2020 mengalami trend peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,36% dan tingkat realisasi 97,49%. Meskipun, pada tahun 2021, jumlah pagu anggaran lebih rendah dari tahun 2020 mengingat pada tahun tersebut mengalami penurunan pagu yang diakibatkan dampak Covid-19. Tingkat capaian “Sangat Tinggi” didukung faktor komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan program kegiatan, pengawalan dan pengendalian program kegiatan dilakukan secara terukur, efektif dan efisien dan evaluasi kegiatan yang rutin dilaksanakan, serta adanya tindak lanjut pasca evaluasi yang didukung pelaksanaan inovasi “TRENGGINAS”. Selain itu, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah juga berkolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota, pelaku usaha/ asosiasi/ masyarakat, akademisi, perbankan, dan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga, pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target indikator kinerja utama DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan program dan kegiatan tentu tidak dapat lepas dari tantangan dan peluang. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah juga cukup kompleks, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Selain itu, tantangan dan peluang juga dapat muncul dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi saat ini maupun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2018 – 2023 maupun Renstra Tahun 2024-2026. Adapun tantangan dan peluang DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah antara lain :

Tantangan

Beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pencapaian target kinerja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah guna mendukung pertumbuhan nilai penanaman modal dan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2025-2029 antara lain :

1. Mewujudkan perekonomian daerah dengan produktivitas tinggi dengan tetap menerapkan ekonomi hijau dan hilirisasi investasi strategis;
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah ditengah ancaman resesi ekonomi global, termasuk krisis pangan dan energi;
3. Mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antarmasyarakat dan antarwilayah dan persebaran realisasi penanaman modal secara optimal;
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penyediaan layanan perizinan secara mudah, cepat, transparan dan akuntabel serta responsif dalam penanganan pengaduan;
5. Meningkatkan koordinasi lintas stakeholder terutama dalam penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) termasuk penyediaan lahan untuk peruntukan industri;
6. Meningkatkan antusiasme pelaku usaha dalam pengajuan insentif penanaman modal daerah;
7. Menyediakan tenaga kerja yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan industri;
8. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung investasi, terutama wilayah Jawa Tengah bagian tengah dan selatan.

Peluang

1. Tingkat kepercayaan investor terhadap iklim investasi dapat dilihat dari peningkatan nilai realisasi investasi dan realisasi jumlah proyek PMA dan PMDN;
2. Penerbitan regulasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha;
3. Meningkatnya status Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Peningkatan ketersediaan angkatan kerja harus dikelola secara maksimal seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, termasuk dukungan upah tenaga kerja yang kompetitif;
5. Ketersediaan Mal Pelayanan Publik di 35 Kabupaten/ Kota dan kegiatan klinik pendampingan perizinan berusaha di daerah;
6. Penyediaan kajian Investment Ready to Offer (IPRO), peluang investasi prospektif dan potensial, serta dukungan sumber daya alam unggulan (pertanian, perkebunan, perikanan) yang dapat dikembangkan menjadi pertanian terintegrasi, agro industri dan wisata alam/desa;
7. Pembangunan jalan tol Bawen – Yogyakarta yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi di jalur tengah Jawa Tengah.

2.4. Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Perumusan masalah kebijakan adalah tahap awal dalam proses penyusunan kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi, analisis, dan definisi masalah yang dihadapi oleh organisasi. Perumusan masalah kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun tepat sasaran dan efektif dalam menyelesaikan masalah, membantu pembuat kebijakan untuk memahami akar permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, memperjelas tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai, dan memudahkan proses pengambilan keputusan dan penyusunan program.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2021, bahwa tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi antara lain :

Tabel 2.11.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya realisasi penanaman modal yang berkelanjutan	Belum optimalnya perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Kurangnya informasi potensi investasi
			Regulasi/ kebijakan sering berubah
			Belum semua Kabupaten/ Kota memiliki Perda/Perkada tentang RDTR
			Penyediaan infrastruktur investasi yang belum merata
			Produk UKM kalah bersaing
		Belum optimalnya realisasi kepemintan penanaman modal	Kurangnya kualitas kegiatan promosi penanaman modal
			Kurang optimalnya digitalisasi promosi
			Belum optimalnya fasilitasi kepeminatan penanaman modal (pendampingan *end to end*)
			Munculnya permasalahan baik internal maupun eksternal dari para calon investor
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Kurangnya kepatuhan PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM
			Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal
			Kurangnya literasi/ pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi penanaman modal
			Kurang efektifnya pengawasan secara bersama-sama
2.	Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Belum optimalnya ketepatan waktu penerbitan perizinan	Kurangnya literasi dan kepatuhan pelaku usaha terkait pengurusan perizinan
			Kurangnya sinkronisasi regulasi perizinan antar sektor atau K/L
			Kendala pengembangan dan operasionalisasi sistem perizinan
			Munculnya permasalahan perizinan yang bersifat khusus, dinamis, dan belum diatur dalam regulasi
		Belum optimalnya	Regulasi perizinan sektoral

		pemenuhan standar pelayanan	dari K/L yang sangat dinamis
			Masih adanya potensi risiko tuntutan dan pengaduan atas pelayanan perizinan yang diberikan
			Keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dalam mendukung proses pelayanan
			Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana layanan baik kualitas standar maupun kecukupan kebutuhan
		Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	Pengelolaan sistem informasi yang kurang efektif dan efisien
			Belum tersedia SDM yang memiliki kompetensi penataan jaringan, mitigasi keamanan sistem, dan statistisi
			Kurangnya publikasi positif terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan

2.5. Isu Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Isu strategis lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang menjadi tantangan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, dan Potensi daerah yang menjadi kewenangan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah.

a. Gambaran Pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, bahwa DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Susunan organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kelompok jabatan fungsional yang ada akan melaksanakan program dan kegiatan yang tergabung dalam beberapa Kelompok Kerja (Pokja).

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terdiri atas Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Selanjutnya, program-program tersebut terintegrasi dalam satu peta proses bisnis yang menggambarkan alur pelayanan dan mekanisme kerja yang ada di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah memiliki peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Penyusunan peta proses bisnis tersebut merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

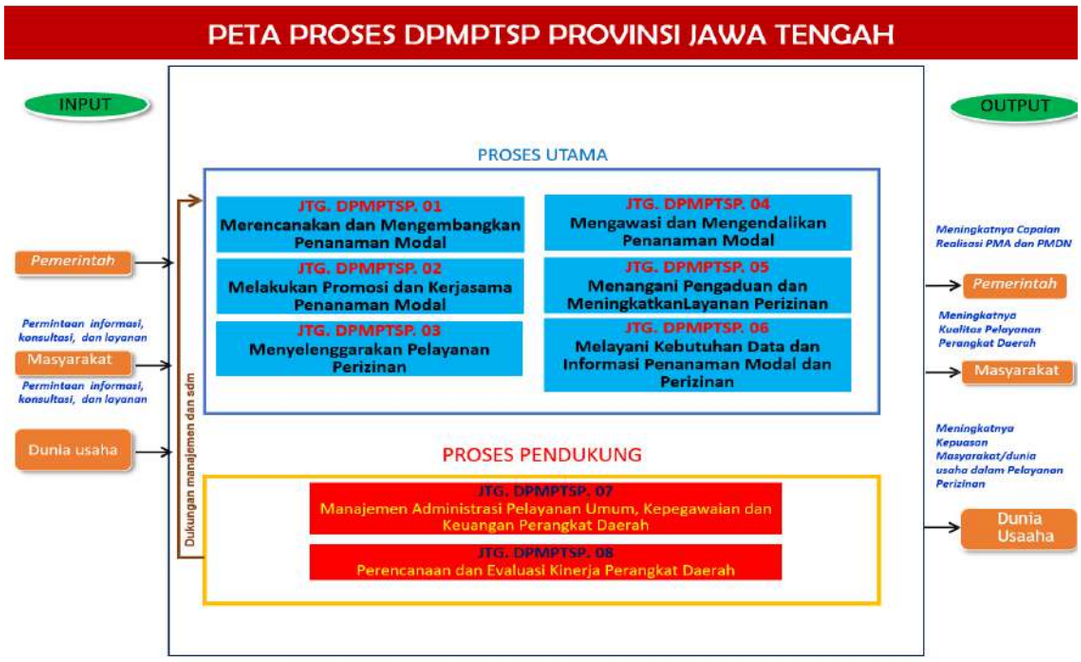

Gambar 2.3.
Peta Proses DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

b. Isu Strategis Lingkungan Dinamis (Isu Global, Nasional, Dan Regional) Yang Bersumber Dari :

1) Sasaran Jangka Menengah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM

Visi RPJPN 2025-2045 adalah “Negara Nusantara Bedaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Negara Nusantara merupakan negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai proses maritim dunia. Berdaulat memiliki makna ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju memiliki makna berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan memiliki makna lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029, Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Pencapaian visi Presiden melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins), dan 320 Program Kerja. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, yaitu:

a) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
b) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
c) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
d) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
e) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
f) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
g) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
h) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025-2029 berperan dalam mendukung pencapaian Misi (Prioritas Nasional) ke-5 pada RPJMN yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”, pada Sasaran Prioritas Nasional (PN) “Integrasi Ekonomi Domestik dan Global”, dengan indikator PN “Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDB)”. Penanaman modal didorong bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.

Dan mendukung pencapaian Misi (Prioritas Nasional) ke-7, yaitu: “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan", terutama memperkuat birokrasi diantaranya penguatan tata kelola OSS RBA. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya birokrasi penanaman modal yang adaptif dan melayani.

Visi Penanaman Modal 2045 berdasarkan RUPM 2025-2045 yaitu "**Penanaman Modal yang Produktif dan Berkualitas melalui Perbaikan Iklim Investasi untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045**". **Produktif** dimaknai bahwa penanaman modal berkontribusi terhadap aspek-aspek perekonomian seperti: (i) menciptakan lapangan kerja; (ii) mendukung hilirisasi; (iii) mendorong transfer teknologi; (iv) mendorong penelitian dan pengembangan (RnD); dan (v) mendukung industri berorientasi ekspor dan spillover effect (pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun di daerah).

Berkualitas dimaknai bahwa penanaman modal dilakukan secara berkelanjutan serta mendukung *green economy* dan *blue economy*; dan meningkatkan stok infrastruktur di berbagai wilayah, inklusif antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Iklim Investasi dimaknai perbaikan penanaman investasi mengarah pada berbagai hal seperti: (i) kepastian hukum (ii) transparansi kebijakan; (iii) ketersediaan sumberdaya input; (iv) kemudahan berusaha; (v) layanan dan pendampingan; (vi) insentif yang mudah dan menarik; dan vii) stabilitas ekonomi dan politik.

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam tiga Misi yaitu: (1) mendukung iklim investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing; (2) mendukung penanaman modal pada sektor dan aktivitas yang memiliki efek pengganda paling besar terhadap perekonomian; dan (3) mendorong penanaman modal yang merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan data UN Trade and Development, tren FDI global yang cenderung turun. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu FDI Global tahun 2023 yang turun sebesar -2% (US$ 1,33 Triliun), FDI ke negara berkembang yang turun sebesar -7%, ekonomi global turun sebesar -2.7%, kondisi geopolitik belum

mereda dan persaingan menarik investasi global semakin ketat. Negara-negara Eropa dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mulai banyak melirik Vietnam dan negara-negara di benua Afrika sebagai tujuan investasi.

2) Implikasi RTRW bagi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Rencana tata ruang dibuat karena pada dasarnya ruang memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peraturan untuk mengatur dan merencanakan ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif.

Dokumen lingkungan sebagai produk hasil dari kegiatan perencanaan ruang berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang. Selain itu, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dokumen lingkungan tersebut akan diproses apabila kegiatan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan tata ruang. Jika tidak sesuai, kegiatan tersebut harus ditolak. Kesesuaian tata ruang hanyalah salah satu hal yang mempermudah perencananaan dan penanganan lingkungan. Walaupun sudah sesuai dengan tata ruang, suatu kegiatan atau usaha bisa bermasalah terhadap lingkungan jika tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan dengan baik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Di dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah, Rencana Struktur Ruang Wilayah, Rencana Pola Ruang Wilayah, Kawasan Strategis, Arahan Pengembangan Wilayah, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah, Arahan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang Wilayah, Peran Masyarakat dan Kelembagaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

Pada Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Dalam perkembangannya, sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dilakukan perubahan sebagai berikut :

a) Penambahan Pasal 7A ayat (1), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi; dan

b) Penambahan Pasal 7A ayat (4), Dalam hal RZWP-3-K sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 245 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Oleh karena itu, pada tahun 2022, Pemerintah Jawa Tengah berupaya mengintegrasikan RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi yang disesuaikan dengan muatan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang. Dengan adanya integrasi RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi maka penataan ruang darat dan laut menjadi satu kesatuan dan menjadi 1 (satu) produk rencana tata ruang.

Kegiatan pembangunan masyarakat yang memanfaatkan ruang harus diimbangi oleh pemerintah yang berperan sebagai pengatur dan penertib pemanfaatan ruang dengan merumuskan berbagai kebijakan dan pedoman penataan ruang daerah. Pengaturan dan penertiban pemanfaatan ruang tersebut dimaksudkan untuk :

a) Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang mengharuskan penyelenggaraan penataan ruang yang lebih transparan, efektif, dan partisipatif;
b) Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan negara. Sehingga pembangunan harus bijaksana dilandasi wawasan lingkungan untuk mencapai kesinambungan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan generasi mendatang;
c) Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah;
d) Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tata ruang mempunyai kaitan erat dengan perizinan dan penanaman modal.

3) Implikasi KLHS bagi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
b. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup.

Selain itu, KLHS juga wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta rencana rincinya, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu untuk pulau-pulau kecil terluar serta rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan.

Pengembangan investasi dan perizinan tentunya tidak dapat terlepas dari keterkaitan penerapan KLHS tersebut. Dokumen lingkungan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum suatu usaha berjalan. Hal ini dimaksudkan agar keberlangsungan usaha tidak mengganggu aspek kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan perizinan yang memanfaatkan ruang dan/ atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko lingkungan hidup yang meliputi:

a) perubahan iklim;
b) kerusakan, kemerosotan, dan/ atau kepunahan keanekaragaman hayati;
c) peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
d) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
e) peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
f) peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/ atau
g) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Dengan demikian, KLHS menjadi penting karena sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/

atau program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan Pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, rencana, dan/atau program termasuk perizinan terhadap lingkungan hidup dapat dihindari.

4) Hasil Penjaringan Masukan Stakeholder Oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dan kegiatan rapat/ diskusi yang lain, terdapat beberapa saran/ masukan/ usul sebagai berikut :

a) Investasi sebagai driver utama pertumbuhan ekonomi daerah pasca pandemi dan ditengah ketidakpastian global sehingga perlu perencanaan investasi yang komprehensif;
b) Perencanaan investasi melalui pendekatan berbasis data, berbasis wilayah dan berbasis dampak sehingga mampu mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada;
c) Perlu menyusun strategi peningkatan investasi, terutama mendorong berkembangnya sektor unggulan Jawa Tengah, dengan tetap memperhatikan aspek hilirisasi, daya saing daerah, transformasi hijau dan penguatan iklim usaha;
d) Peran strategis DPMPTSP dalam menjembatani pencapaian target RPJMD, sektor prioritas, dan menarik minat investor;
e) Perlunya harmonisasi dan kolaborasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, terutama penyelenggaraan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan pelaku usaha;
f) Mendorong peningkatan kualitas layanan publik, penyederhanaan perizinan, dan reformasi birokrasi.

c. Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan iklim penanaman modal, mulai dari penerbitan regulasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha, penyediaan kajian *Investment Ready to Affer (IPRO)*, digitaliasi promosi, dan penyederhanaan perizinan serta optimalisasi pelayanan perizinan dengan memanfaatkan sistem informasi sehingga dapat dilaksanakan secara cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Regulasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Regulasi ini mengatur tentang kebijakan Penanaman Modal, kewenangan Pemerintah Daerah, insentif dan kemudahan Penanaman Modal, rencana umum Penanaman Modal Daerah, dukungan Pemerintah Daerah, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan pengenaan sanksi.

Sebagai regulasi turunan dari Perda tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Pergub ini mengatur tentang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, dan Pengenaan Sanksi Adminitratif.

Regulasi diatas merupakan bukti nyata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatasi faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal, pemberian insentif dan kemudahan berusaha, mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, memberikan kepastian hukum di bidang penanaman modal, membentuk biaya ekonomi yang berdaya saing, dan penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Insentif penanaman modal yang diberikan berupa :

a) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah kewenangan Pemerintah Daerah;
b) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah kewenangan Pemerintah Daerah;
c) pemberian bantuan modal kepada UMK-M dan/atau koperasi di Daerah;
d) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMK-M dan/atau koperasi di Daerah;
e) bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMK-M dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
f) bunga pinjaman rendah.

Adapun bentuk kemudahan berusaha yang diberikan yaitu :

a) penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
b) penyediaan sarana dan prasarana;
c) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya;
d) pemberian bantuan teknis;
e) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
f) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
h) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
i) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
k) kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau
l) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Selain menyediakan kajian IPRO yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah juga berupaya menyediakan kajian IPRO melalui kegiatan *Investment Callenge (IC).* Kegiatan tersebut bertujuan mendorong Pemerintah Kabupaten/ Kota, sebagai pemangku wilayah, untuk menyusun IPRO yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota. Selanjutnya, kajian IPRO tersebut akan disajikan melalui aplikasi *Central Java Investment Platform (CJIP)* sehingga dapat diakses secara lebih luas, kapanpun dan dimanapun.

Guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelaku usaha, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menyederhanakan pelayanan perizinan. Regulasi yang mengatur tentang perizinan terus disempurnakan sesuai dengan regulasi diatasnya, dan terkahir telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Seluruh pelayanan perizinan dilaksanakan secara online dengan memanfaatkan sistem informasi baik *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* dan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng). Dengan demikian pelayanan perizinan dapat dilaksanakan secara cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Tabel 2.12.
Perumusan Isu Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan iklim penanaman modal, mulai dari penerbitan regulasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha, penyediaan kajian Investment Ready to Affer (IPRO), digitaliasi promosi, dan penyederhanaan perizinan serta optimalisasi pelayanan perizinan dengan memanfaatkan sistem informasi	- Belum optimalnya realisasi penanaman modal yang berkelanjutan - Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Kegiatan perizinan yang memanfaatkan ruang dan/ atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko lingkungan hidup	FDI ke negara berkembang yang turun sebesar -7%, ekonomi global turun sebesar -2.7%, kondisi geopolitik belum mereda dan persaingan menarik investasi global semakin ketat	Penanaman modal diarahkan dapat berkontribusi terhadap aspek-aspek perekonomian seperti menciptakan lapangan kerja, mendukung hilirisasi, mendorong transfer teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan (RnD), serta mendukung industri berorientasi ekspor dan *spillover effect*	- Investor banyak berminat berinvestasi di Provinsi lain di Pulau Jawa mengingat ketersediaan sarana prasarana dan kawasan industri yang cukup lengkap serta aksesibilitas distribusi barang - Daya dukung lingkungan yang terbatas	- Belum ada upaya yang cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap iklim investasi global, sehingga jumlah investor yang berinvestasi di Jawa Tengah masih sangat dipengaruhi oleh kondisi global. - Kurangnya konsistensi dalam kebijakan pusat menyebabkan daerah kesulitan untuk merealisasikan kebijakan tersebut karena selalu dihadapkan pada perubahan yang memerlukan kajian dan implementasi ulang. - Belum berhasil meningkatkan keunggulan komparatif dan infrastruktur investasi di Jawa Tengah secara signifikan, sehingga daya tarik investasi di daerah pesaing justru semakin meningkat. - Keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketersediaan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan kebutuhan industri.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran tersebut didapatkan dari kertas kerja cascading yang telah disusun sebelumnya.

a. Tujuan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Tujuan pada hakikatnya merupakan hasil akhir yang akan dicapai atas pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan. Tujuan perangkat daerah juga menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap perangkat daerah dan merupakan *ultimate outcome* yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2029 adalah Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045 yang didukung oleh 6 Misi. Sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi kedua “Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan” dan misi keenam “Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif dan integrasi.”

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, antara lain :

Tujuan	:	1. Meningkatkan Penanaman Modal 2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis
Indikator tujuan	:	1. Kontribusi PMTB terhadap PDRB 2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

b. Sasaran DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah memperhatikan tujuan yang ditetapkan dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi, profil layanan serta kelompok sasaran (stakeholder) yang akan dilayani. Selain itu, perumusan sasaran juga telah mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Untuk mendukung pencapaian indikator tujuan, maka perlu ditetapkan indikator sasaran.

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 3 (tiga) sasaran, yaitu :

Sasaran	:	1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah 3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
Indikator sasaran	:	1. Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan Penanaman Modal		Kontribusi PMTB terhadap PDRB	%	-	-	30,55	30,63	30,75	30,86	30,94	31	30,94
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal	%	12,59	14,83	10,09	10,13	10,32	10,46	10,61	10,75	10,75

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	84,28	85,37	84	84,5	85	85,5	86	86	86
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	%	2,93	2,96	3	3,05	3,1	3,15	3,2	3,2	3,2
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	%	94,14	97,13	91	92	93	94	95	96	96

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkret, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan memperhatikan pohon kinerja dan cascading yang sudah disusun, dan selanjutnya dituangkan dalam tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan Penanaman Modal	**Sasaran 1** Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal yang kompetitif, penyelenggaraan promosi, pengawasan pengendalian penanaman modal dan peningkatan layanan perizinan yang didukung oleh sistem informasi yang handal	Peningkatan kualitas bahan promosi penanaman modal yang dipublikasikan
			Peningkatan kegiatan promosi penanaman modal
			Peningkatan layanan perizinan
			Peningkatan pengawasan penanaman modal
			Penyediaan standar pelayanan dan layanan pengaduan
			Peningkatan dukungan sistem informasi penanaman modal dan perizinan
Tujuan 2 Meningkatkan	**Sasaran 2.1** Meningkatnya	Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko	• Peningkatan manajemen

kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	perangkat daerah	perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja dengan dukungan data yang berkualitas • Penyempurnaan reformasi birokrasi, manajemen risiko dan peta proses bisnis • Peningkatan sinergi antar program kegiatan dengan memperluas jejaring kerja sama antar pemerintah dan stakeholder
	Sasaran 2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	• Peningkatan dukungan sarana prasarana layanan sesuai standar dan kecukupan kebutuhan • Peningkatan kompetensi SDM baik *softskill* maupun *hardskill* • Peningkatan keterbukaan informasi publik

Setelah memperhatikan perumusan strategi dan arah kebijakan pada tabel diatas, selanjutnya perlu menyajikan pentahapan pembangunan yang dimaksudkan untuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Prioritas dalam setiap tahapan mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Pentahapan dimaksud disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3.
Pentahapan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan iklim penanaman modal yang kompetitif melalui penyediaan kajian sektor unggulan, promosi, dan layanan perizinan	Peningkatan kinerja penanaman modal dengan didukung promosi yang tepat sasaran, peningkatan layanan perizinan dan pengawasan	Akselerasi kinerja penanaman modal melalui pengawalan kepeminatan investasi, peningkatan kualitas layanan perizinan dan pengawasan	Pemantapan kinerja penanaman modal melalui kerjasama promosi, peningkatan layanan kualitas perizinan dan pengawasan yang didukung oleh sistem informasi yang handal	Perwujudan kinerja penanaman modal yang semakin maju, mudah, cepat, transparan dan akuntabel

3.3 Manajemen Risiko Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya.

Proses manajemen risiko seluruhnya dituangkan dalam lampiran Renstra ini. Sedangkan untuk rencana tindak pengendalian pada konteks tujuan dan sasaran perangkat daerah dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4.
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Penanaman Modal	Kontribusi PMTB terhadap PDRB	Penurunan investasi akibat pelambatan perekonomian global	20	Pelambatan perekonomian disebabkan penurunan konsumsi dan permintaan international	Keuntungan perekonomian global menurun	Koordinasi antar stakeholder penanaman modal untuk menyusun data peluang investasi dan memfasilitasi calon investor dalam penjajakan investasi	Kepala DPMPTSP	2025-2029
						Pertemuan fasilitasi penjajakan penanaman modal	Kepala DPMPTSP	2025-2029
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal	Ketidakpastian investor dalam merealisasikan investasinya	20	Inkonsistensi regulasi kebijakan antar level pemerintah	Pertumbuhan investasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan	Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh calon investor dengan melibatkan stakeholder terkait	Kepala DPMPTSP	2025-2029
						Sosialisasi dan diseminasi regulasi kebijakan penanaman modal		

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Lemahnya tata kelola organisasi	12	Sistem pengawasan dan tata laksana yang kurang optimal dan efektif	Terhambatnya peningkatan kualitas pelayanan; Kinerja perangkat daerah tidak optimal	Kolaborasi dengan stakeholder terkait; Evaluasi serta review kebijakan secara berkala		2025-2029
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	9	Perubahan kebijakan dan regulasi yang dinamis dari pemerintah pusat terkait mekanisme kerja dan struktur organisasi	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Penyempurnaan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kepala DPMPTSP	2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Capaian Indeks Manajemen Risiko tidak sesuai dengan target yang ditetapkan	12	Kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai	Menurunnya kinerja Perangkat Daerah	Pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian secara berkala	Kepala DPMPTSP	2025-2029

3.4 Implementasi Responsif Gender Perangkat Daerah

Menjalankan amanah Peraturah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarustamaan Gender, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah telah menyusun *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk periode 2025 – 2029. Tujuan penyusunan GAP ini adalah untuk menjamin ha katas kesetaraan gender dalam sector penanaman modal dan perizinan. Adapun GAP yang telah disusun sebagai berikut :

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 4 LANGKAH
TAHUN 2025-2029
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH

A. DATA GENDER

ISU GENDER

1. Akses : Hambatan literasi digital dan beban ganda membuat perempuan sulit mengakses layanan perizinan dan informasi investasi.
2. Partisipasi: Perempuan hadir tetapi kurang berperan aktif dalam forum konsultasi dan kegiatan investasi.
3. Kontrol: Perempuan lemah dalam kontrol terhadap izin usaha, aset, dan posisi pengambil keputusan di birokrasi PTSP.
4. Manfaat: Manfaat investasi lebih banyak dinikmati laki-laki; perempuan pelaku usaha dan pekerja sektor informal belum optimal menerima manfaat.

B. FAKTOR PENYEBAB

Faktor penyebab isu gender di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.5.
Faktor Penyebab Isu Gender
DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Isu Gender	Faktor Penyebab Langsung	Faktor Penyebab Tidak Langsung
Perempuan pelaku usaha belum memiliki akses setara terhadap layanan perizinan dan informasi investasi	1. Hambatan literasi digital perempuan pelaku usaha (khususnya UMKM) 2. Beban ganda domestik membatasi waktu akses layanan 3. Norma sosial: urusan perizinan dianggap domain laki-laki	1. Sistem OSS/SIAP belum memuat variabel gender pemohon 2. Jam layanan formal belum fleksibel/ramah gender 3. Tidak ada strategi sosialisasi khusus untuk perempuan pelaku usaha
Perempuan hadir tetapi partisipasinya masih rendah dalam forum perencanaan/investasi	1. Jumlah peserta perempuan dalam forum koordinasi/kegiatan investasi lebih sedikit dibanding laki-laki 2. Perempuan yang hadir cenderung pasif, kurang percaya diri menyampaikan pendapat	1. Tidak ada kebijakan kuota keterwakilan gender di forum 2. Moderator/narasumber forum didominasi laki-laki 3. Agenda forum tidak memberi ruang khusus pada isu perempuan
Perempuan lemah dalam kontrol atas kepemilikan usaha, legalitas, dan posisi strategis di birokrasi PTSP	1. Usaha milik perempuan sering dicatat atas nama suami/laki-laki 2. Norma keluarga: laki-laki dianggap lebih pantas pegang legalitas usaha 3. Minimnya perempuan pada jabatan strategis sektor investasi	1. Tidak ada kebijakan afirmasi untuk perempuan di jabatan strategis 2. Sistem pencatatan izin tidak sensitif gender
Manfaat investasi/perizinan lebih banyak dinikmati laki-laki dibanding perempuan	1. Investasi dominan di sektor padat karya laki-laki (manufaktur, konstruksi) 2. Usaha perempuan (UMKM) skala kecil kurang dapat akses insentif/fasilitasi 3. Perempuan kurang terhubung jaringan bisnis/industri	1. Program insentif belum membedakan kelompok usaha perempuan 2. Belum ada mekanisme monitoring manfaat investasi bagi perempuan

C. RENCANA AKSI

Tabel 3.6.

Rencana Aksi

KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target					Pagu Indikatif				
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	91	91,5	92	92,5	93	-	-	-	-	-
						Meningkatnya kualitas standar layanan dan penyelesaian pengaduan	Persentase standar pelayanan yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang berkualitas	Persentase kepeminatan yang terealisasi	%	57	62	66	70	72	-	-	-	-	-
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah	Terselenggarakannya layanan perizinan	Jumlah perizinan yang diterbitkan	Dokumen	1500	1500	1500	1500	1500	-	-	-	-	-

KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target					Pagu Indikatif				
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
					Provinsi													
						Terselenggaranya layanan perizinan	Jumlah laporan evaluasi pelayanan perizinan yang disusun	Dokumen	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
						Terselenggaranya layanan perizinan	Jumlah pendampingan dan konsultasi perizinan dan non perizinan	Pelaku Usaha	6000	6000	6000	6000	6000	-	-	-	-	-
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya standar layanan dan penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-

KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target					Pagu Indikatif				
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
						Tersedianya standar layanan dan penyelesaian pengaduan	Jumlah dokumen ISO yang diterapkan	Dokumen	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terselenggarakan kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah kepeminatan Penanaman Modal yang dilakukan Pengawalan	Unit	35	40	45	50	55	-	-	-	-	-
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	6000	6000	6000	6000	6000	340.000.000	299.200.000	320.000.000	452.540.000	497.794.000

KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target					Pagu Indikatif				
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	1500	1500	1500	1500	1500	402.000.000	331.650.000	350.000.000	535.062.000	588.568.200
2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	4	4	4	4	4	58.000.000	51.040.000	58.000.000	77.198.000	84.917.800
2	18	04	1.01	0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha	Pelaku usaha	600	600	600	600	600	177.995.000	275.000.000	286.000.000	600.000.000	650.000.000

KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target					Pagu Indikatif				
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
					Berbasis Risiko	Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik											
						Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen standar pelayanan yang disusun dan dievaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1	367.028.000	236.500.000	248.560.000	531.000.000	594.000.000
2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	35	40	45	50	55	1.008.739.000	1.005.000.000	1.091.420.000	1.500.702.000	1.650.772.000

KODE					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target					Pagu Indikatif				
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	22.252.000	210.000.000	231.000.000	363.000.000	399.300.000

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan tujuan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.1. dibawah ini.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan Penanaman Modal *												4.161.219.000		4.503.605.000		7.724.891.000		8.482.280.000		9.329.969.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Kontribusi PMTB terhadap PDRB *	%	30,53	30,55	30,63		30,75		30,86		30,94		31		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal **											4.161.219.000		4.503.605.000		7.724.891.000		7.724.891.00		9.329.969.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal **	%	14,83	10,09	10,13	4.161.219.000	10,32	4.503.605.000	10,46	7.724.891.000	10,61	8.482.280.000	8	9.329.969.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL ***									719.514.000		791.465.000		1.173.342.000		1.290.677.000		1.419.706.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
						Meningkatnya kualitas bahan promosi penanaman modal yang dipublikasikan	Persentase peningkatan pengakses bahan promosi investasi yang telah dipublikasikan ***	%	N/A	10	10	719.514.000	10	791.465.000	10	1.173.342.000	10	1.290.677.000	10	1.419.706.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.18.02.1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi ****								719.514.000		791.465.000		1.173.342.000		1.290.677.000		1.419.706.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
						Tersedianya bahan promosi penanaman modal	Jumlah penyediaan bahan promosi yang dihasilkan ****	Dokumen	2	3	3	719.514.000	3	791.465.000	3	1.173.342.000	3	1.290.677.000	3	1.419.706.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
		2.18.02.1.02.0003			Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) *****							243.750.000		268.125.000		453.750.000		499.125.000		549.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
						Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi *****	Daerah	N/A	35	35	243.750.000	35	268.125.000	35	453.750.000	35	499.125.000	35	549.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.18.02.1.02.0004			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi *****							202.400.000		222.640.000		306.130.000		336.743.000		370.417.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
						Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah *****	Dokumen	6	8	8	202.400.000	8	222.640.000	8	306.130.000	8	336.743.000	8	370.417.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
		2.18.02.1.02.0005			Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi *****							273.364.000		300.700.000		413.462.000		454.809.000		500.289.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
						Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi *****	Dokumen	1	1	1	273.364.000	1	300.700.000	1	413.462.000	1	454.809.000	1	500.289.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL ***									1.215.000.000		1.322.420.000		1.863.702.000		2.050.072.000		2.255.080.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
						Meningkatnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang berkualitas	Persentase kepeminatan yang terealisasi ***	%	N/A	57	62	1.215.000.000	66	1.322.420.000	70	1.863.702.000	72	2.050.072.000	72	2.255.080.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
		2.18.03.1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi ****								1.215.000.000		1.322.420.000		1.863.702.000		2.050.072.000		2.255.080.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
						Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah kepeminatan Penanaman Modal yang dilakukan Pengawalan ****	Unit	N/A	35	40	1.215.000.000	45	1.322.420.000	50	1.863.702.000	55	2.050.072.000	35	2.255.080.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi *****							1.005.000.000		1.091.420.000		1.500.702.000		1.650.772.000		1.815.850.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
						Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi *****	Dokumen	N/A	35	40	1.005.000.000	45	1.091.420.000	50	1.500.702.000	55	1.650.772.000	35	1.815.850.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
		2.18.03.1.01.0003			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi *****							210.000.000		231.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
						Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	1	1	1	210.000.000	1	231.000.000	1	363.000.000	1	399.300.000	1	439.230.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL ***									1.193.390.000		1.262.560.000		2.195.800.000		2.415.280.000		2.656.408.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	
						Meningkatnya penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan ***	%	99,8	91	91,5	681.890.000	92	728.000.000	92,5	1.064.800.000	93	1.171.280.000	93	1.288.408.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	
		2.18.04.1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi ****								681.890.000		728.000.000		1.064.800.000		1.171.280.000		1.288.408.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	
						Terselenggaranya layanan perizinan	Jumlah perizinan yang diterbitkan ****	Dokumen	3347	1500	1500	331.650.000	1500	350.000.000	1500	535.062.000	1500	588.568.200	1500	647.425.020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik *****							331.650.000		350.000.000		535.062.000		588.568.200		647.425.020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	
						Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik *****	Pelaku Usaha	N/A	1500	1500	331.650.000	1500	350.000.000	1500	535.062.000	1500	588.568.200	1500	647.425.020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
						Terselenggaranya layanan perizinan	Jumlah laporan evaluasi pelayanan perizinan yang disusun ****	Dokumen	N/A	4	4	51.040.000	4	58.000.000	4	77.198.000	4	84.917.800	4	93.409.580	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko *****							51.040.000		58.000.000		77.198.000		84.917.800		93.409.580	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha *****	Kegiatan Usaha	N/A	4	4	51.040.000	4	58.000.000	4	77.198.000	4	84.917.800	4	93.409.580	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
						Terselenggaranya layanan perizinan	Jumlah pendampingan dan konsultasi perizinan dan non perizinan ****	Pelaku Usaha	3531	6000	6000	299.200.000	6000	320.000.000	6000	452.540.000	6000	497.794.000	6000	547.573.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	
		2.18.04.1.02.0006			Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko *****							299.200.000		320.000.000		452.540.000		497.794.000		547.573.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	
						Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik *****	Pelaku Usaha	6	6000	6000	299.200.000	6000	320.000.000	6000	452.540.000	6000	497.794.000	6000	547.573.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kualitas standar layanan dan penyelesaian pengaduan	Persentase standar pelayanan yang ditetapkan ***	%	100	100	100	511.500.000	100	534.560.000	100	1.131.000.000	100	1.244.000.000	100	1.368.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	
		2.18.04.1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota ****								511.500.000		534.560.000		1.131.000.000		1.244.000.000		1.368.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	
						Tersedianya standar layanan dan penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti ****	%	100	100	100	275.000.000	100	286.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko *****							550.000.000		572.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik *****	Pelaku Usaha	550	600	600	275.000.000	600	286.000.000	600	600.000.000	600	650.000.000	600	700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
						Tersedianya standar layanan dan penyelesaian pengaduan	Jumlah dokumen ISO yang diterapkan ****	Dokumen	1	2	2	236.500.000	2	248.560.000	2	531.000.000	2	594.000.000	2	668.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko *****							473.000.000		497.120.000		1.062.000.000		1.188.000.000		1.336.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	
						Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen standar pelayanan yang disusun dan dievaluasi *****	Dokumen	1	1	1	236.500.000	1	248.560.000	1	531.000.000	1	594.000.000	1	668.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ***									632.500.000		650.160.000		1.760.000.000		1.921.000.000		2.113.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	
						Meningkatnya pengawasan penanaman modal	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui ***	%	42,38	22	25	632.500.000	27	650.160.000	30	1.760.000.000	32	1.921.000.000	32	2.113.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	
		2.18.05.1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi ****								632.500.000		650.160.000		1.760.000.000		1.921.000.000		2.113.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	
						Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Persentase LKPM yang disetujui ****	%	N/A	32	36	236.500.000	40	243.600.000	42	695.000.000	45	750.000.000	45	825.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.18.05.1.01.0006			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha *****							236.500.000		243.600.000		695.000.000		750.000.000		825.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	
						Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko *****	Pelaku Usaha	10	120	400	236.500.000	400	243.600.000	400	695.000.000	400	750.000.000	120	825.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
						Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Prosentase kepatuhan terhadap kegiatan usaha/proyek yang telah dilakukan pengawasan ****	%	N/A	50	51	396.000.000	52	406.560.000	53	1.065.000.000	55	1.171.000.000	55	1.288.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.18.05.1.01.0004			Pengawasan Penanaman Modal *****							396.000.000		406.560.000		1.065.000.000		1.171.000.000		1.288.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	
						Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha *****	Kegiatan Usaha	133	170	180	396.000.000	190	406.560.000	200	1.065.000.000	220	1.171.000.000	170	1.288.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL ***									400.815.000		477.000.000		732.047.000		805.251.000		885.775.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan ***	%	10	10	10	400.815.000	10	477.000.000	10	732.047.000	10	805.251.000	10	885.775.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	
		2.18.06.1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi ****								400.815.000		477.000.000		732.047.000		805.251.000		885.775.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	
						Tersedianya data dan informasi penanaman modal	Persentase data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang dipublikasikan ****	%	N/A	100	100	147.335.000	100	199.000.000	100	274.270.000	100	301.697.000	100	331.866.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik *****							294.670.000		398.000.000		548.540.000		603.394.000		663.732.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan *****	Dokumen	4	4	4	147.335.000	4	199.000.000	4	274.270.000	4	301.697.000	4	331.866.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
						Tersedianya data dan informasi penanaman modal	Jumlah aplikasi yang dikembangkan ****	Unit	1	1	1	253.480.000	1	278.000.000	1	457.777.000	1	503.554.000	1	553.909.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik *****							506.960.000		556.000.000		915.554.000		1.007.108.000		1.107.818.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi *****	Dokumen	1	1	1	253.480.000	1	278.000.000	1	457.777.000	1	503.554.000	1	553.909.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *												20.764.168.000		21.232.942.000		29.900.419.000		32.141.542.000		34.647.691.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah *	Angka	85,37	84	84,5		85		85,5		86		86		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah **											266.660.000		303.385.000		475.884.00		514.000.00		580.150.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah **	Angka	2,96	3	3,05	266.660.000	3,1	303.385.000	3,15	475.884.00	3,2	514.000.000	3,25	580.150.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									266.660.000		303.385.000		475.884.00		514.000.000		580.150.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			PROVINSI ***																			
						Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko dan pelayanan perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ***	%	100	100	100	266.660.000	100	303.385.000	100	475.884.00	100	514.000.000	100	580.150.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								266.660.000		303.385.000		475.884.00		514.000.000		580.150.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	100	266.660.000	100	303.385.000	100	475.884.00	100	514.000.000	100	580.150.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01 .0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							121.660.000		143.385.000		211.098.000		230.000.000		254.460.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	4	4	4	121.660.000	4	143.385.000	4	211.098.000	4	230.000.000	4	254.460.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.01 .0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							115.000.000		130.000.000		194.786.000		214.264.000		235.690.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	4	4	4	115.000.000	4	130.000.000	4	194.786.000	4	214.264.000	4	235.690.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							15.000.000		15.000.000		35.000.000		35.000.000		45.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	1	15.000.000	1	15.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							15.000.000		15.000.000		35.000.000		35.000.000		45.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daera	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	15.000.000	1	15.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah **											20.497.508.000		20.929.557.000		29.424.535.000		31.627.542.000		34.067.541.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah **	Angka	97,13	91	92	20.497.508.000	93	20.929.557.000	94	29.424.535.000	95	31.627.542.000	96	34.067.541.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									20.497.508.000		20.929.557.000		29.424.535.000		31.627.542.000		34.067.541.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			***																			
						Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko dan pelayanan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	100	20.497.508.000	100	20.929.557.000	100	29.424.535.000	100	31.627.542.000	100	34.067.541.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								17.161.000.000		17.524.500.000		22.032.226.000		24.225.450.000		26.752.490.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	1	1	1	17.161.000.000	1	17.524.500.000	1	22.032.226.000	1	24.225.450.000	1	26.752.490.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							16.861.000.000		17.199.500.000		21.682.226.000		23.850.450.000		26.235.495.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	86	86	91	16.861.000.000	96	17.199.500.000	101	21.682.226.000	106	23.850.450.000	111	26.235.495.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							300.000.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000		516.995.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	12	300.000.000	12	325.000.000	12	350.000.000	12	375.000.000	12	516.995.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								80.000.000		82.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	80.000.000	1	82.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							80.000.000		82.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	80.000.000	1	82.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								55.000.000		55.000.000		290.000.000		165.000.000		315.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	55.000.000	100	55.000.000	100	290.000.000	100	165.000.000	100	315.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		150.000.000		0		150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	N/A	0	N/A	0	1	150.000.000	N/A	0	1	0150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****							25.000.000		25.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	2	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							30.000.000		30.000.000		100.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	50	50	50	30.000.000	50	30.000.000	50	100.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								582.508.000		699.057.000		1.189.809.000		1.334.092.000		1.477.191.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	582.508.000	100	699.057.000	100	1.189.809.000	100	1.334.092.000	100	1.477.191.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							30.000.000		40.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	30.000.000	1	40.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							60.000.000		80.000.000		150.000.000		170.000.000		180.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	60.000.000	1	80.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							50.000.000		70.000.000		100.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	50.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							50.000.000		70.000.000		120.000.000		150.000.000		160.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	50.000.000		70.000.000		120.000.000		150.000.000		160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							50.000.000		60.000.000		100.000.000		120.000.000		125.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							14.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	12	12	14.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							60.000.000		65.000.000		100.000.000		110.000.000		125.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	12	12	60.000.000	12	65.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							243.008.000		270.057.000		444.809.000		454.092.000		522.191.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	12	243.008.000		270.057.000		444.809.000		454.092.000		522.191.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							13.500.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	1	1	13.500.000	1	15.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							12.000.000		14.000.000		25.000.000		30.000.000		40.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	1	1	12.000.000	1	14.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								230.000.000		0		1.892.500.000		1.550.000.000		900.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	27	6	230.000.000	N/A	0	61	1.892.500.000	41	1.550.000.000	50	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		700.000.000		800.000.000		0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	350.000.000	1	400.000.000	1	700.000.000	1	800.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							150.000.000		0		1.192.500.000		750.000.000		900.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	27	3	150.000.000	N/A	0	60	1.192.500.000	40	750.000.000	50	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							80.000.000		0		0		0		0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	3	80.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								2.124.000.000		2.250.000.000		2.965.000.000		3.213.000.000		3.382.860.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	12	2.124.000.000	12	2.250.000.000	12	2.965.000.000	12	3.213.000.000	12	3.382.860.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							9.000.000		10.000.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	12	9.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	18.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							500.000.000		550.000.000		750.000.000		825.000.000		850.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	500.000.000		550.000.000		750.000.000		825.000.000		850.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							35.000.000		40.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	35.000.000	12	40.000.000	12	100.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1.580.000.000		1.650.000.000		2.100.000.000		2.250.000.000		2.362.860.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	12	1.580.000.000	12	1.650.000.000	12	2.100.000.000	12	2.250.000.000	12	2.362.860.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								265.000.000		319.000.000		935.000.000		990.000.000		1.090.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	187	197	265.000.000	207	319.000.000	217	935.000.000	227	990.000.000	237	1.090.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****								100.000.000		124.000.000		210.000.000		220.000.000		250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	24	24	100.000.000	24	124.000.000	24	210.000.000	24	220.000.000	24	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							10.000.000		15.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	10	10	10.000.000		15.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							65.000.000		75.000.000		250.000.000		270.000.000		300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	150	160	65.000.000	170	75.000.000	180	250.000.000	190	270.000.000	200	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							75.000.000		90.000.000		360.000.000		375.000.000		400.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	2	2	75.000.000	2	90.000.000	2	360.000.000	2	375.000.000	2	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							15.000.000		15.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 4.2.
Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Pendampingan penerbitan Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha UMK dan non UMK	Kegiatan Klinik Pendampingan Perizinan Jemput Bola	Program Pelayanan Penanaman Modal	Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan	OPD Teknis
				Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
			Penyediaan layanan pendampingan melalui FO dan gerai investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal		OPD Teknis
				Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		

						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
2	Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan	Kegiatan penilaian dalam rangka pemberian insentif serta kemudahan penanaman modal bagi investor yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Pelaku usaha yang diberi insentif berusaha	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	BAPPEDA, OPD Teknis
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi		
3	Pengembangan Investasi berbasis Padat Modal Infrastruktur Padat Karya	Menyusun riset investasi berbasis padat karya	Tersusunnya riset investasi berbasis padat karya sebanyak 2 dokumen	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	BAPPEDA,BRIDA, OPD Terkait, DPMPTSP Kab/Kota
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			
						Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		
		Menyusun peta investasi berbasis padat karya	Tersusunnya peta investasi berbasis padat karya sebanyak 2 dokumen	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				BAPPEDA,BRIDA, OPD Terkait, DPMPTSP Kab/Kota
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			
						Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		
		Identifikasi potensi investasi projek pemerintah yang padat karya	Tersusunnya identifikasi potensi investasi projek pemerintah yang padat karya sebanyak 1 dokumen	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				BAPPEDA,BRIDA, OPD Terkait, DPMPTSP Kab/Kota
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			
						Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		
		Penyelenggaraan business meeting	Business meeting yang dilaksanakan sebanyak 20 kegiatan	Program Promosi Penanaman Modal				BAPPEDA, DISPERINDAG, DINKOP UKM
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		
4	Penguatan kolaborasi perizinan dan	Penyelenggaraan kegiatan Pena Si Johan	Layanan Pena Si Johan sebanyak 15 kegiatan	Program Pelayanan Penanaman Modal			Bidang Pelayanan Perizinan,	OPD Teknis
					Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

	penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha					Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan	
		Penyelenggaraan pendampingan perizinan tematik	Klinik Pendampingan Perizinan Jemput Bola sebanyak 30 kegiatan	Program Pelayanan Penanaman Modal				OPD Teknis
					Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
		Penyelenggaraan pendampingan NIB pelaku usaha di desa kategori miskin	Pendampingan NIB pelaku usaha di desa kategori miskin	Program Pelayanan Penanaman Modal				DINKOP UKM, DISPERMADES DUKCAPIL, BIRO KESRA
					Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
		Penyelenggaraan pencatatan realisasi investasi sektor UMK	Pencatatan realisasi investasi sektor UMK sebanyak 175 kegiatan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi	DINKOP UKM, DISPERINDAG, DPMPTSP Kab/Kota
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
						Pengawasan Penanaman Modal		
5	Pembangunan kolaboratif mendorong terjalinnya partisipasi berbasis hexahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan lembaga keuangan)	Penyelenggaraan Central Java Investment Business Forum	CJIBF yang dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan	Program Promosi Penanaman Modal			Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	KPw Bank Indonesia Jawa Tengah, DPMPTSP Kab/Kota
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. IKU sebagai ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi/ unit kerja dalam mencapai tujuan. Selain IKU, juga ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan Penanaman Modal yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut ditampilkan dalam tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3.
Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Keterangan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029										
A.	**Kontribusi PMTB Terhadap PDRB**	Na	Na	30,55	30,63	30,75	30,86	30,94	31	
1.	Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal	12,59	14,83	10,09	10,13	10,32	10,46	10,61	10,75	
B.	**Indeks Reformasi Birokrasi**	84,28	85,37	84	84,5	85	85,5	86	86	
1.	Indeks Manajemen Risiko	2,93	2,96	3	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,14	97,13	91	92	93	94	95	96	

Pencapaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tentu didukung oleh IKK yang akan dicapai DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2025-2029 seperti yang dijelaskan dalam tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Keterangan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	12,59	14,83	10,09	10,13	10,32	10,46	10,61	10,75	
2.	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	85,41	85,73	85,75	86	86,25	86,5	86,75	87	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanaman modal berdasarkan telaah isu strategis, peluang dan tantangan kebijakan pembangunan daerah dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional. Dokumen ini juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek normatif seperti yang telah diatur dalam perundangundangan.

Penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra ini mengacu pada jumlah progam secara hirarkis pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman dalam penyusunannya dan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Dalam proses penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, menjaring masukan secara *top down* maupun *bottom up*, dan memperlihatkan asumsi makro dan mikro. Tahapan ini dilalui guna proses penyempurnaan dokumen perencanaan teknokratis ini sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam mengimplementasikan Renstra tersebut diperlukan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, loyalitas & intergritas dari seluruh jajaran DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Semoga Renstra Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini dapat mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Tengah, yaitu “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045” dan pencapaian misi kedua “Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan” dan misi keenam “Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif dan integrasi.”

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaanya dan apabila ketersediaan anggaran (APBD dan APBN) tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain :

1. Memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Renstra;
2. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Renstra;
3. Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama baik antar unit kerja internal maupun stakeholder eksternal guna mencapai target program kegiatan secara efektif dan efisien.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Kelompok Kerja pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pencapaian target dan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Seluruh SDM DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah harus menjalin koordinasi, kolaborasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah akan dijabarkan dalam Renja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah wajib berpedoman pada Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 mengacu RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Tahun 2025-2029. Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini dapat diwujudkan dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) urusan penanaman modal, kondusivitas daerah, nasional dan global yang menjamin stabilitas ekonomi dan pembangunan, kemampuan adaptasi terhadap situasi disruptif dan peran serta masyarakat.

Melalui Renstra ini, diharapkan sasaran program dan kegiatan jangka menengah DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah semakin realistis untuk dicapai melalui penajaman berbagai program dan kegiatan. Semangat gotong-royong seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah tetap terus dijaga dan dikembangkan dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2025-2029 serta pelaksanaan program prioritas.

Dengan demikian, diharapkan sektor penanaman modal dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan. Sehingga dapat mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, pembangunan yang terus meningkat dan berkelanjutan serta dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

Pohon Kinerja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

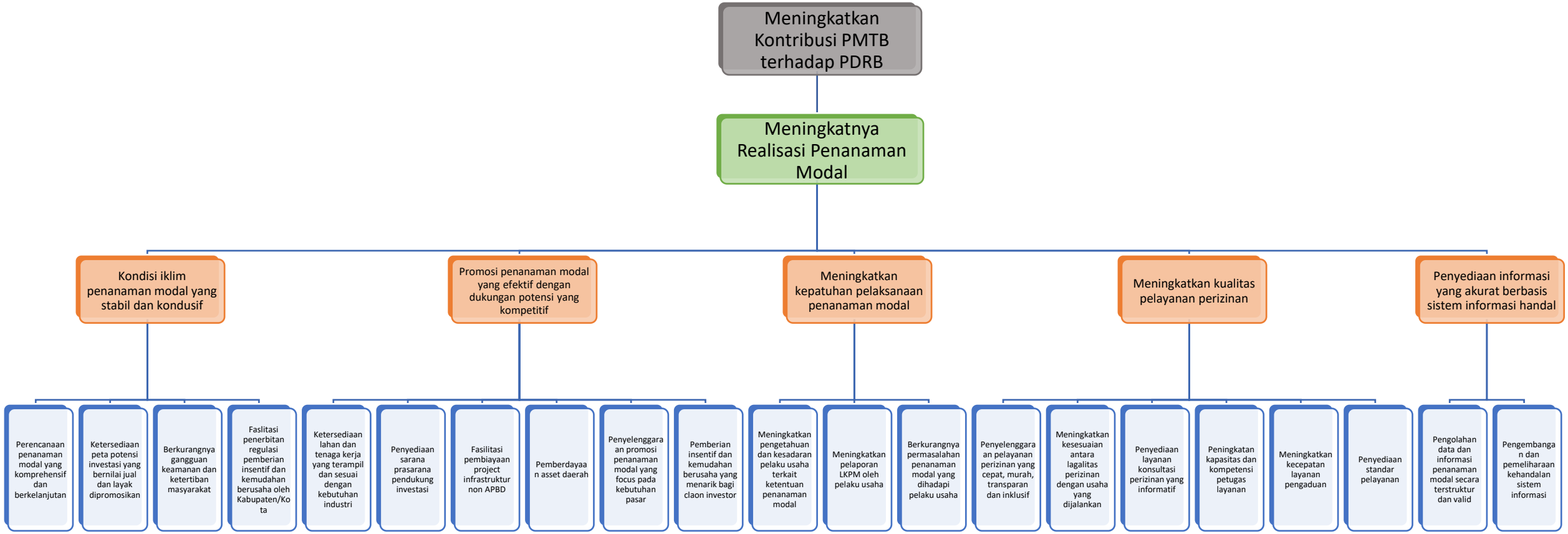

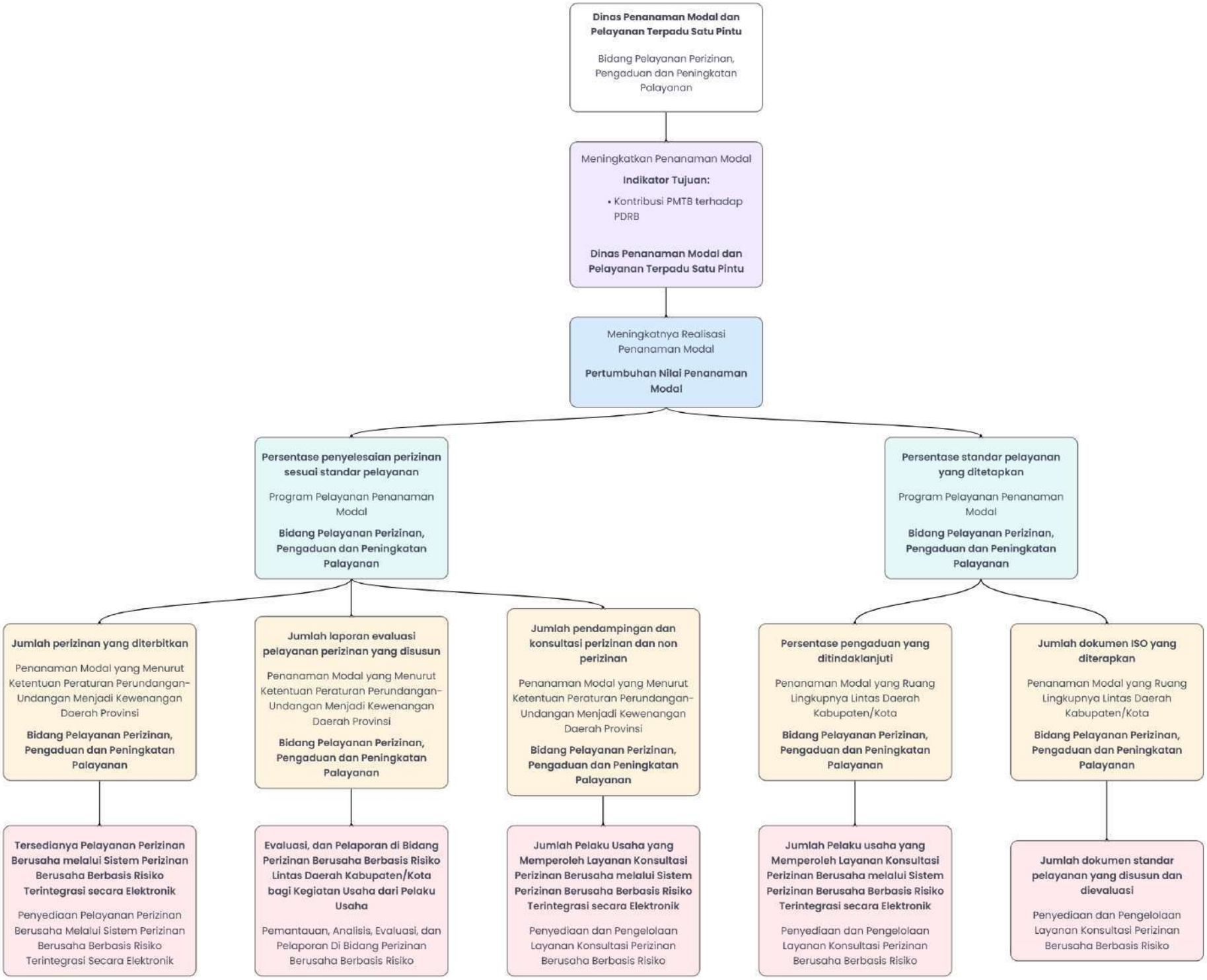
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
Meningkatkan Penanaman Modal
Indikator Tujuan:
• Kontribusi PMTB terhadap PDRB
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal
Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan
Program Pelayanan Penanaman Modal
Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
Persentase standar pelayanan yang ditetapkan
Program Pelayanan Penanaman Modal
Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
Jumlah perizinan yang diterbitkan
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
Jumlah laporan evaluasi pelayanan perizinan yang disusun
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
Jumlah pendampingan dan konsultasi perizinan dan non perizinan
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
Jumlah dokumen ISO yang diterapkan
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Jumlah dokumen standar pelayanan yang disusun dan dievaluasi
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

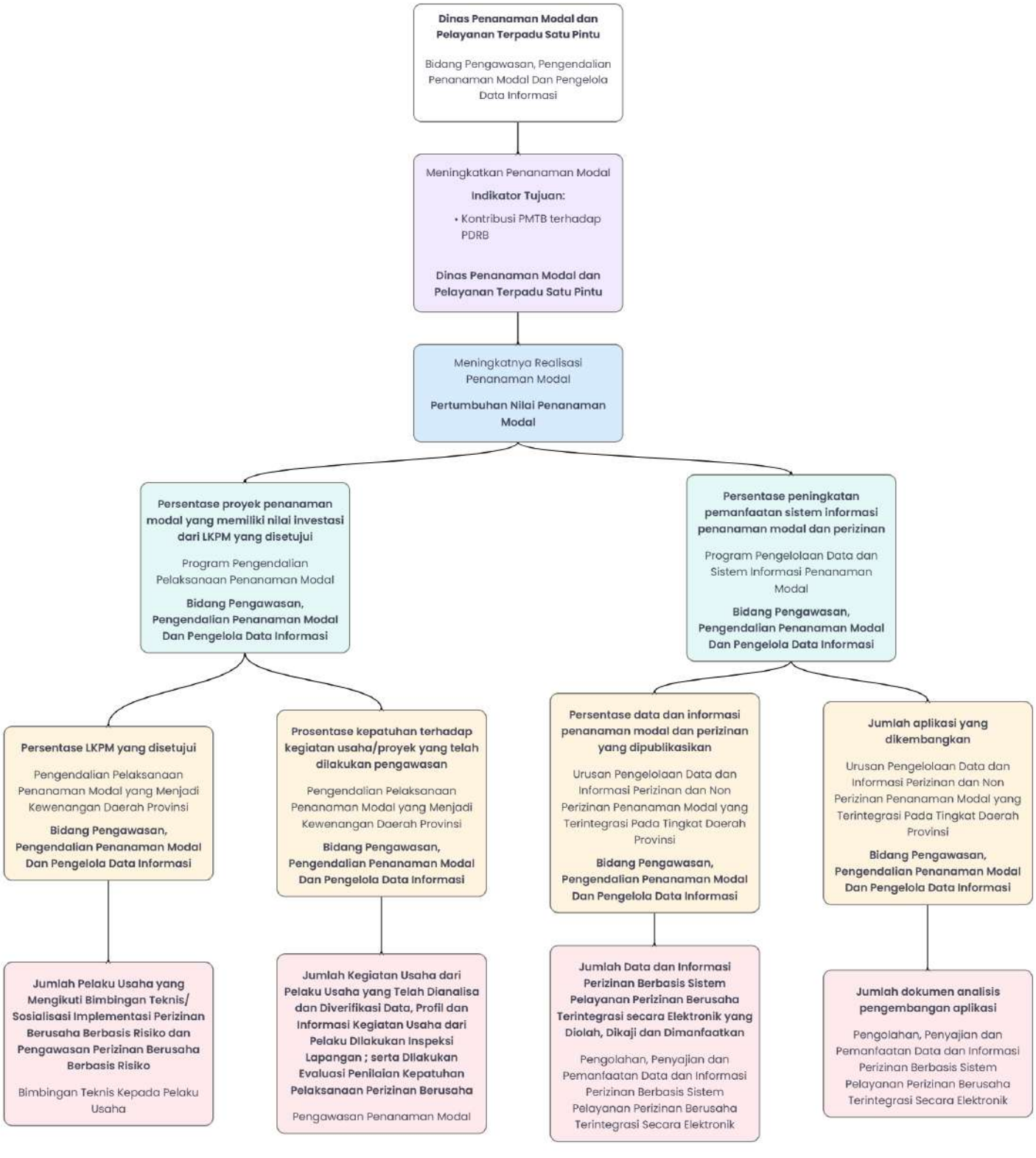
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
Meningkatkan Penanaman Modal
Indikator Tujuan:
• Kontribusi PMTB terhadap PDRB
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal
Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
Persentase LKPM yang disetujui
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
Prosentase kepatuhan terhadap kegiatan usaha/proyek yang telah dilakukan pengawasan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
Persentase data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang dipublikasikan
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi
Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
Jumlah aplikasi yang dikembangkan
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi
Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
Pengawasan Penanaman Modal
Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

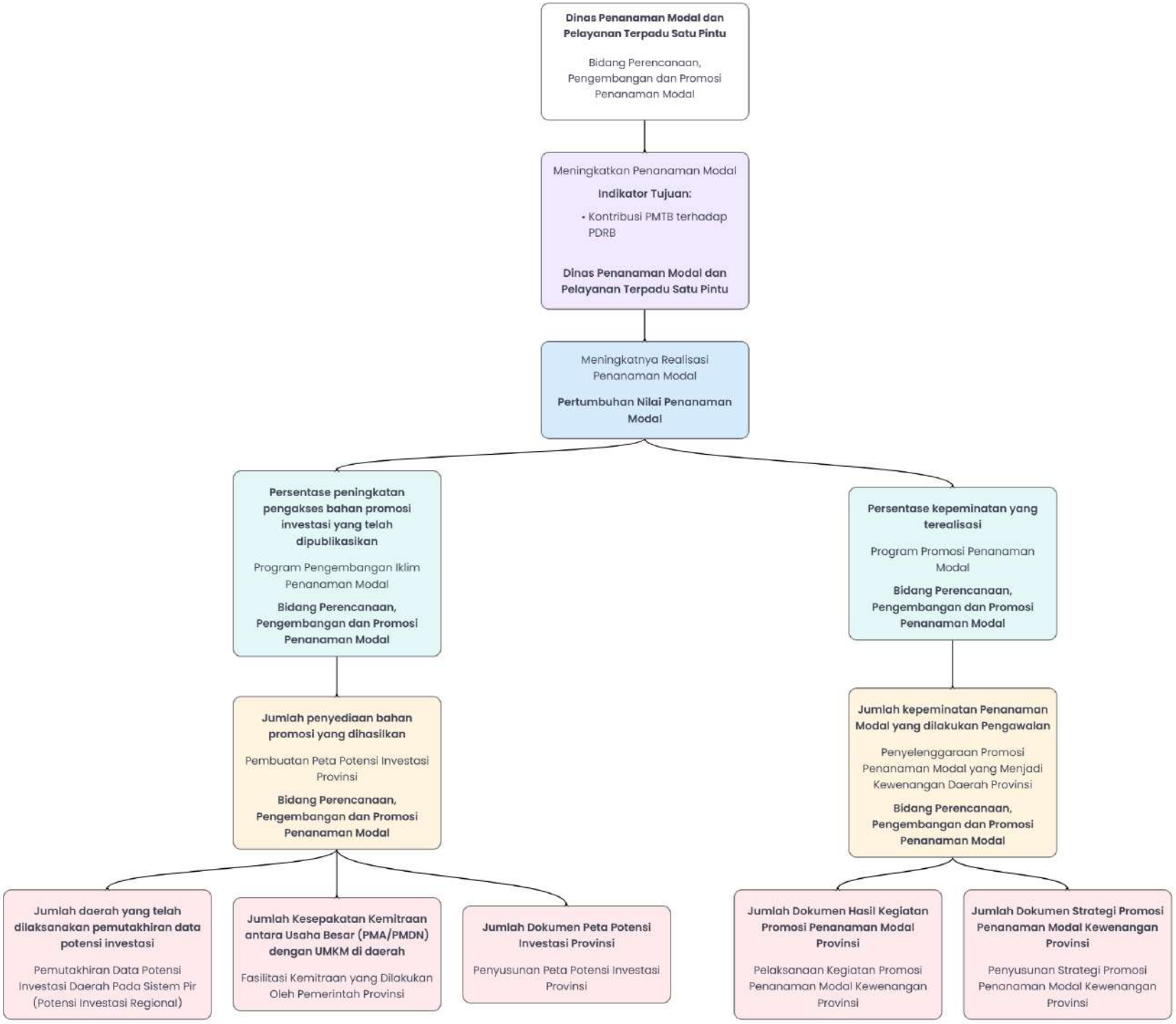
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
Meningkatkan Penanaman Modal
Indikator Tujuan:
• Kontribusi PMTB terhadap PDRB
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal
Persentase peningkatan pengakses bahan promosi investasi yang telah dipublikasikan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
Persentase kepeminatan yang terealisasi
Program Promosi Penanaman Modal
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
Jumlah penyediaan bahan promosi yang dihasilkan
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
Jumlah kepeminatan Penanaman Modal yang dilakukan Pengawalan
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi
Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem Pir (Potensi Investasi Regional)
Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi
Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

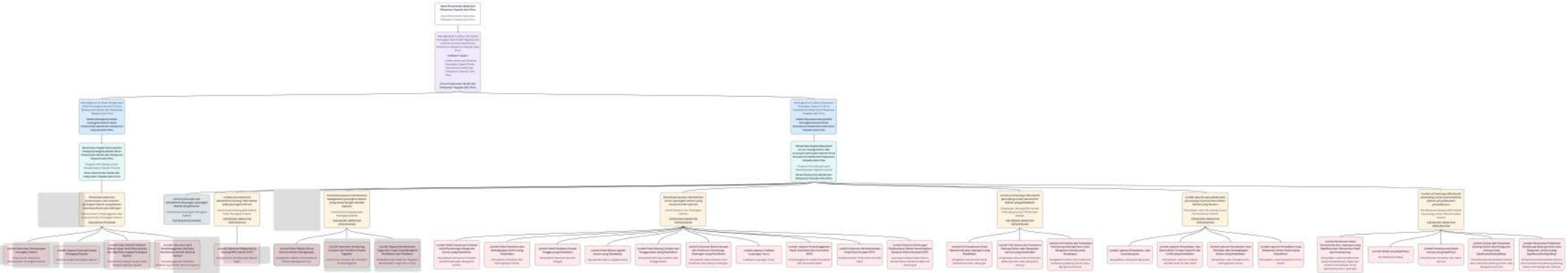

Tabel 1

Identifikasi Risiko

NO.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Strategis	Meningkatnya Penanaman Modal	Kontribusi PMTB terhadap PDRB	Penurunan investasi akibat pelambatan perekonomian global	Risiko Strategis	Pelambatan perekonomian disebabkan penurunan konsumsi dan permintaan international	Keuntungan perekonomian global menurun	Pemprov Jawa Tengah
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal	Ketidakpastian investor dalam merealisasikan investasinya	Risiko Strategis	Inkonsistensi regulasi kebijakan antar level pemerintah	Pertumbuhan investasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan	Pemprov Jawa Tengah
	Sasaran Program	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase penyediaan bahan promosi yang dipublikasikan	Informasi potensi dan peluang investasi yang terbatas	Risiko Operasional	Belum adanya pemetaan potensi dan peluang investasi	Berkurangnya minat calon investor	DPMPTSP, Stakeholder terkait
	Sasaran Kegiatan	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah penyediaan bahan promosi yang dihasilkan	Kajian peta potensi investasi kurang menampilkan data yang informatif	Risiko Operasional	Kurangnya sumber data terkait	Penerapan invetasi tidak mengacu pada pedoman yang ada	Pelaku Usaha, Pemda Kab/Kota, Pemprov Jateng, Stakeholders terkait
			Persentase kemitraan usaha yang terjalin	Kepeminatan kemitraan tidak dapat terealisasi	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen dari pelaku UMKM untuk menjadi UMKM siap bermitra	Kemitraan usaha ntara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Bidang Penanaman Modal terhambat realisasinya	Stakeholder terkait, pelaku usaha

NO.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Program	Promosi Penanaman Modal	Persentase kepeminatan yang terealisasi	Calon investor kurang tertarik berinvestasi	Risiko Operasional	Munculnya permasalahan baik internal maupun eksternal dari para calon investor, antar level pemerintah dan stakeholder lain serta dampak perlambatan ekonomi	Investor membatalkan rencana investasinya di Provinsi Jawa Tengah	DPMPTSP, Pelaku Usaha
	Sasaran Kegiatan	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	Calon investor membatalkan kepeminatannya	Risiko Operasional	Munculnya permasalahan baik internal maupun eksternal dari para calon investor, antar level pemerintah dan stakeholder lain serta dampak perlambatan ekonomi	Target jumlah kepeminatan investasi izin usaha dan/ atau izin komersial tidak tercapai sehingga nilai investasi tidak maksimal	Stakeholder terkait, pelaku usaha
	Sasaran Program	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	LKPM tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha terhadap kewajiban penyampaian LKPM; perubahan regulasi	Pertumbuhan investasi tidak mencapai target	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pelaporan LKPM pelaku usaha yang telah diberikan bimbingan teknis dan disetujui	Terlambatnya penyampaian LKPM	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha terhadap kewajiban penyampaian LKPM. Kurangnya sosialisasi t entang kewajiban Pelaku Usaha	Data realisasi investasi tidak tercatat secara maksimal. Pelaku usaha tidak mentaati peraturan yang berlaku	Pelaku Usaha, stakeholder
			Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan	Pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal kepada seluruh PMA/PMDN di Jateng	Risiko Operasional	Pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal kepada seluruh PMA/PMDN di Jateng	Tidak tercapainya target pengawasan sehingga mempengaruhi realisasi investasi	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

NO.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengawasan proyek tidak maksimal karena adanya potensi gratifikasi	Risiko Fraud	Kurangnya pemberitahuan ke pelaku usaha dan diseminasi ke pegawai DPMPTSP terkait larangan gratifikasi	Pelanggaran integritas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
	Sasaran Program	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pemenuhan standar pelayanan	Pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak dapat dilayani	Risiko Operasional	Dinamisnya regulasi perizinan dan nonperizinan	Pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku	Pelaku usaha, pengguna layanan
			Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	Terhambatnya penerbitan izin sesuai ketentuan waktu	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi dengan OPD Teknis	Menurunnya kualitas pelayanan perizinan	Masyarakat/pelaku usaha
		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah standar pelayanan yang ditetapkan	Kemungkinan terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan regulasi	Risiko Operasional	Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur layanan perizinan dan nonperizinan	Proses pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha menjadi terhambat	Pelaku usaha, pengguna layanan
				Pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak dapat dilayani	Risiko Operasional	Adanya perubahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan perizinan dan nonperizinan	Terjadi ketidaksesuaian persyaratan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha dengan NSPK terbaru	Pelaku usaha, pengguna layanan
	Sasaran Kegiatan	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perizinan yang diterbitkan	Terhambatnya penerbitan izin sesuai ketentuan waktu & terhambatnya notifikasi	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi dengan OPD Teknis dan system OSS RBA yang masih dikembangkan sesuai kebutuhan	Perizinan terlambat terbit	Pelaku usaha
			Jumlah laporan evaluasi pelayanan	Terhambatnya penerbitan izin sesuai ketentuan	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi dengan OPD Teknis dan	Perizinan terlambat terbit	Pelaku usaha

NO.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			perizinan yang disusun	waktu & terhambatnya notifikasi		system OSS RBA yang masih dikembangkan sesuai kebutuhan		
	Sasaran program	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	Informasi perizinan dan non perizinan tidak lengkap	Risiko Operasional	Data yang kurang update, pengelolaan datang belum optimal	Kurangnya informasi perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha	Masyarakat, stakeholder terkait
	Sasaran Kegiatan	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang dipublikasikan	Data dan informasi penanaman modal tidak terinformasikan secara optimal	Risiko Operasional	Keterbatasan Sumber Daya dalam pengolahan data dan informasi untuk kegiatan publikasi	Kurang optimalnya penyampaian data dan informasi terkait penanaman modal	Stakeholder terkait, pelaku usaha, serta masyarakat
			Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi yang dikembangkan tidak dapat berjalan dengan optimal	Risiko Operasional	Keterbatasan Sumber Daya dalam pemeliharaan dan pengembangan aplikasi, dan perubahan regulasi yang sering terjadi	Kurang optimalnya pelayanan perizinan dan penanaman modal	OPD Teknis terkait, pelaku usaha, serta masyarakat

Tabel 2

Analisis Risiko

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Skala Risiko yang Melekat			Upaya pengendalian			Skala Risiko Residu Setelah Dilakukan Pengendalian		
		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian Pengendalian	Memadai /Belum Memadai	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
	Penurunan investasi akibat pelambatan perekonomian global	4	5	20	Ada	Fasilitasi penanaman modal, kepeminatan penanaman modal, sampai dengan terbitnya izin usaha dan/atau izin komersial	Memadai	3	4	12
	Ketidakpastian investor dalam merealisasikan investasinya	4	5	20	Ada	Fasilitasi penanaman modal, kepeminatan penanaman modal, sampai dengan terbitnya izin usaha dan/atau izin komersial	Memadai	3	4	12
	Informasi potensi dan peluang investasi yang terbatas	4	5	20	Ada	Menyusun Rencana Aksi Kegiatan	Memadai	3	4	12
	Kajian peta potensi investasi kurang menampilkan	4	5	20	Ada	Menyusun Rencana Aksi Kegiatan	Memadai	3	4	12

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Skala Risiko yang Melekat			Upaya pengendalian			Skala Risiko Residu Setelah Dilakukan Pengendalian		
		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian Pengendalian	Memadai /Belum Memadai	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
	data yang informatif									
	Kepeminatan kemitraan tidak dapat terealisasi	4	5	20	Ada	Memfasilitasi penjajakan penanaman modal sampai dengan kepeminatan penanaman modal	Memadai	3	4	12
	Calon investor kurang tertarik berinvestasi	4	5	20	Ada	Fasilitasi penanaman modal	Memadai	3	4	12
	Calon investor membatalkan kepeminatannya	4	5	20	Ada	Memfasilitasi kepeminatan penanaman modal sampai pada terbitnya izin usaha	Memadai	3	4	12

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Skala Risiko yang Melekat			Upaya pengendalian			Skala Risiko Residu Setelah Dilakukan Pengendalian		
		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian Pengendalian	Memadai /Belum Memadai	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
	LKPM tidak tepat waktu	4	5	20	Ada	Telah dilakukan pengawasan dan sosialisasi LKPM	Memadai	3	4	12
	Terlambatnya penyampaian LKPM	4	5	20	Ada	Mengingatkan pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan melalui email	Memadai	2	3	6
	Pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal kepada seluruh PMA/PMDN di Jateng	2	4	8	Ada	Menyusun data perusahaan yang akan diawasi dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP Kab/Kota se Jateng selanjutnya dibuat prioritas perusahaan yang akan dilakukan pengawasan	Memadai	2	3	6

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Skala Risiko yang Melekat			Upaya pengendalian			Skala Risiko Residu Setelah Dilakukan Pengendalian		
		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian Pengendalian	Memadai /Belum Memadai	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
	Pengawasan proyek tidak maksimal karena adanya potensi gratifikasi	3	5	15	Ada	Menggunakan Buku Saku Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai sebagai dasar bertingkah laku sebagai upaya menjaga integritas pegawai	Memadai	3	4	12
	Pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak dapat dilayani	3	3	9	Ada	Penyusunan standar pelayanan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku	Memadai	2	2	4
	Terhambatnya penerbitan izin sesuai ketentuan waktu	3	3	9	Ada	Melakukan koordinasi dengan OPD Teknis terkait	Memadai	2	2	4
	Kemungkinan terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan regulasi	2	3	6	Ada	Penyampaian informasi regulasi perizinan	Memadai	1	2	2

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Skala Risiko yang Melekat			Upaya pengendalian			Skala Risiko Residu Setelah Dilakukan Pengendalian		
		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian Pengendalian	Memadai /Belum Memadai	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
	Pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak dapat dilayani	2	4	8	Ada	Memperbaharui standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang terbaru	Memadai	1	3	3
	Terhambatnya penerbitan izin sesuai ketentuan waktu & terhambatnya notifikasi	2	4	8	Ada	Penggunaan sarana dan prasarana layanan perizinan yang menunjang proses perizinan	Memadai	1	3	3
	Terhambatnya penerbitan izin sesuai ketentuan waktu & terhambatnya notifikasi	2	4	8	Ada	Pendampingan layanan Migrasi/ perbaikan data, Pelaksanaan tahapan sesuai dengan SOP yang berlaku	Memadai	1	3	3
	Informasi perizinan dan non perizinan tidak lengkap	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan stakeholder terkait	Memadai	2	2	4

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Skala Risiko yang Melekat			Upaya pengendalian			Skala Risiko Residu Setelah Dilakukan Pengendalian		
		Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian Pengendalian	Memadai /Belum Memadai	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
	Aplikasi yang dikembangkan tidak dapat berjalan dengan optimal.	2	4	8	Ada	Memaksimalkan sumber daya dan sistem aplikasi yang ada	Memadai	1	2	2
	Data dan informasi penanaman modal tidak terinformasikan secara optimal	2	3	6	Ada	Memaksimalkan sumber daya dan sistem aplikasi yang ada	Memadai	1	2	2

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Penurunan investasi akibat pelambatan perekonomian global	20	Kepala DPMPTSP	Pelambatan perekonomian disebabkan penurunan konsumsi dan permintaan international	Keuntungan perekonomian global menurun
Ketidakpastian investor dalam merealisasikan investasinya	20	Kepala DPMPTSP	Inkonsistensi regulasi kebijakan antar level pemerintah	Pertumbuhan investasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan
Informasi potensi dan peluang investasi yang terbatas	20	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Belum adanya pemetaan potensi dan peluang investasi	Berkurangnya minat calon investor
Kajian peta potensi investasi kurang menampilkan data yang informatif	20	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Kurangnya sumber data terkait	Penerapan invetasi tidak mengacu pada pedoman yang ada

Kepeminatan kemitraan tidak dapat terealisasi	20	Koordinator Bidang Promosi Penanaman Modal	Kurangnya komitmen dari pelaku UMKM untuk menjadi UMKM siap bermitra	Kemitraan usaha ntara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Bidang Penanaman Modal terhambat realisasinya
Calon investor kurang tertarik berinvestasi	20	Koordinator Bidang Promosi Penanaman Modal	Munculnya permasalahan baik internal maupun eksternal dari para calon investor, antar level pemerintah dan stakeholder lain serta dampak perlambatan ekonomi	Investor membatalkan rencana investasinya di Provinsi Jawa Tengah
Calon investor membatalkan kepeminatannya	20	Koordinator Bidang Promosi Penanaman Modal	Munculnya permasalahan baik internal maupun eksternal dari para calon investor, antar level pemerintah dan stakeholder lain serta dampak perlambatan ekonomi	Target jumlah kepeminatan investasi izin usaha dan/ atau izin komersial tidak tercapai sehingga nilai investasi tidak maksimal
LKPM tidak tepat waktu	20	Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha terhadap kewajiban penyampaian LKPM; perubahan regulasi	Pertumbuhan investasi tidak mencapai target

Terlambatnya penyampaian LKPM	20	Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha terhadap kewajiban penyampaian LKPM; perubahan regulasi	Pertumbuhan investasi tidak mencapai target
Pengawasan proyek tidak maksimal karena adanya potensi gratifikasi	15	Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal kepada seluruh PMA/PMDN di Jateng	Tidak tercapainya target pengawasan sehingga mempengaruhi realisasi investasi

Tabel 4

Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/SasaranProgram/ Kegiatan DPMPTSP	Indikator Kinerja Program/Kegiatan DPMPTSP	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Penanaman Modal	Kontribusi PMTB terhadap PDRB	Penurunan investasi akibat pelambatan perekonomian global	20	Pelambatan perekonomian disebabkan penurunan konsumsi dan permintaan international	Keuntungan perekonomian global menurun	1. Koordinasi antar stakeholder penanaman modal untuk menyusun data peluang investasi dan memfasilitasi calon investor dalam penjajakan investasi 2. Pertemuan fasilitasi penjajakan penanaman modal	Kepala DPMPTSP	2025-2029
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal	Ketidakpastian investor dalam merealisasikan investasinya	20	Inkonsistensi regulasi kebijakan antar level pemerintah	Pertumbuhan investasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan	1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh calon investor dengan melibatkan stakeholder terkait 2. Sosialisasi dan diseminasi regulasi kebijakan penanaman modal	Kepala DPMPTSP	2025-2029

Tujuan/SasaranProgram/ Kegiatan DPMPTSP	Indikator Kinerja Program/Kegiatan DPMPTSP	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase penyediaan bahan promosi yang dipublikasikan	Informasi potensi dan peluang investasi yang terbatas	20	Belum adanya pemetaan potensi dan peluang investasi	Berkurangnya minat calon investor	Kajian lebih mendalam terhadap substansi kebijakan investasi	Pengarah Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	2025-2029
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah penyediaan bahan promosi yang dihasilkan	Kajian peta potensi investasi kurang menampilkan data yang informatif	20	Kurangnya sumber data terkait	Penerapan invetasi tidak mengacu pada pedoman yang ada	Kajian lebih mendalam terhadap substansi kebijakan investasi dan melakukan monitoring evaluasi setiap bulan	Pengarah Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	2025-2029
	Persentase kemitraan usaha yang terjalin	Kepeminatan kemitraan tidak dapat terealisasi	20	Kurangnya komitmen dari pelaku UMKM untuk menjadi UMKM siap bermitra	Kemitraan usaha antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Bidang Penanaman Modal terhambat realisasinya	Melakukan kegiatan penjaringan potensi kemitraan, fasilitasi, dan temu usaha kemitraan	Pengarah Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	2025-2029
Promosi Penanaman Modal	Persentase kepeminatan yang terealisasi	Calon investor kurang tertarik berinvestasi	20	Munculnya permasalahan baik internal maupun eksternal dari para calon investor, antar level pemerintah dan stakeholder lain serta dampak perlambatan ekonomi	Investor membatalkan rencana investasinya di Provinsi Jawa Tengah	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh calon investor dalam berinvestasi dengan melibatkan stakeholder terkait	Pengarah Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	2025-2029
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	Calon investor membatalkan kepeminatannya	20	Munculnya permasalahan baik internal maupun eksternal dari para calon investor, antar level pemerintah	Target jumlah kepeminatan investasi izin usaha dan/ atau izin komersial tidak tercapai sehingga nilai	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh calon investor dalam berinvestasi dengan melibatkan	Pengarah Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	2025-2029

Tujuan/SasaranProgram/ Kegiatan DPMPTSP	Indikator Kinerja Program/Kegiatan DPMPTSP	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dan stakeholder lain serta dampak perlambatan ekonomi	investasi tidak maksimal	stakeholder terkait		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	LKPM tidak tepat waktu	20	Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha terhadap kewajiban penyampaian LKPM; perubahan regulasi	Pertumbuhan investasi tidak mencapai target	Mengingatkan pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan	Pengarah Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Informasi	2025-2029
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pelaporan LKPM pelaku usaha yang telah diberikan bimbingan teknis dan disetujui	Terlambatnya penyampaian LKPM	20	Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha terhadap kewajiban penyampaian LKPM; perubahan regulasi	Pertumbuhan investasi tidak mencapai target	Mengingatkan pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan melalui email	Pengarah Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Informasi	2025-2029
	Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan	Pengawasan proyek tidak maksimal karena adanya potensi gratifikasi	15	Pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal kepada seluruh PMA/PMDN di Jateng	Tidak tercapainya target pengawasan sehingga mempengaruhi realisasi investasi	Diseminasi bahaya gratifikasi pada setiap briefing perencanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan	Pengarah Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Data Informasi	2025-2029

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sedangkan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah tersebut telah membagi urusan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah menjadi 3 (Tiga) urusan dan 1 (Satu) fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebanyak 6 (Enam) urusan yang terdiri dari Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebanyak 18 (Delapan belas) urusan yang terdiri dari Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
3. Urusan Pilihan sebanyak 8 (Delapan) urusan yang terdiri dari Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebanyak 5 (Lima) fungsi yang terdiri dari Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; dan Fungsi Penunjang Lainnya.

Ketiga urusan dan fungsi penunjang yang ada di Provinsi Jawa Tengah tersebut telah diampu oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang salah satunya adalah pembentukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

Kepemudaan menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan adalah adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda dan Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Memperhatikan stratifikasi usia pemuda antara 16-30 tahun dapat dikatakan bahwa pemuda merupakan kelompok usia produktif dalam artian bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki potensi semangat dan tenaga serta kemampuan *skill* dalam bekerja.

Peningkatan Penduduk usia pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berdasarkan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2024 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.502.800 jiwa yang terdiri dari 4.376.360 jiwa penduduk laki-laki dan 4.126.440 jiwa penduduk perempuan dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 38.233.930 jiwa atau sebesar 22,24%. Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah pemuda di Jawa Tengah yang hampir mencapai seperempat dari total penduduk tersebut secara kuantitas merupakan kelompok masyarakat potensial untuk diberdayakan dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional. Besarnya jumlah pemuda adalah sebuah peluang yang apabila dapat dikelola dengan baik akan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah dan nasional secara keseluruhan, namun sebaliknya pengelolaan yang tidak baik terhadap potensi tersebut akan menjadikan pemuda sebagai penghalang.

Tujuan pembangunan kepemudaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Kepemudaan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang mempunyai fungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keolahragaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan evaluasi. sedangkan Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Kegiatan keolahragaan tersebut mempunyai tujuan keolahragaan nasional yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat saat ini merupakan tantangan dalam mencapai tujuan keolahragaan nasional. Dewasa ini, banyak sekali masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan bertenaga mesin untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain meskipun sebenarnya dapat dilakukan dengan berjalan kaki. Perkembangan teknologi digital juga menjadi salah satu penyebab menurunnya budaya berolahraga di masyarakat karena lebih memilih berdiam diri dan bermain dengan gadget atau alat komunikasi yang dimilikinya. Tujuan keolahragaan nasional selanjutnya adalah prestasi. Prestasi olahraga merupakan sesuatu yang *observable* dan *measurable* mulai dari *talent scouting* sampai proses pembinaan disertai dengan upaya mencermati para kompetitor, oleh karena itu prestasi tidaklah dapat dicapai dengan jalan pintas, namun harus melalui proses yang panjang mulai pemassalan dalam upaya pembudayaan olahraga, pembibitan termasuk pemanduan dan pengembangan atlet berbakat sampai pembinaan dan pengembangan prestasi. Budaya olahraga dapat terbina dengan baik apabila ada persyaratan standar minimal yaitu tersedianya ruang terbuka untuk berolahraga, tersedia tenaga olahraga, ada partisipasi aktif warga masyarakat untuk olahraga secara teratur, dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat cukup memadai. Meski perkembangan keolahragaan sudah baik namun masih juga terdapat beberapa permasalahan diantaranya kurang terarahnya pembibitan, pembinaan dan pemanduan bakat atlet, lemahnya 4 kapasitas kelembagaan olahraga daerah, fasilitas sarana prasarana yang terbatas dan belum membudayanya kebutuhan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat dikalangan masyarakat.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah merupakan penjabaran dokumen Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebiajkan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan pada 6 (enam) misi, yaitu: 1) Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global; 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sector unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsive dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai nilai integritas; 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencnaan tata ruang yang responsif; 5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya local, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; dan 6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. Renstra juga disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 20225-2029 telah menetapkan Tujuan Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah "JAWA TENGAH YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN". Dengan sasaran : yang akan diwujudkan sebagai berikut : 1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis; 2) Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan, serta 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter

Penyusunan dokumen Renstra juga tidak terlepas dari sinergitas antar dokumen perencanaan daerah baik secara vertikal dengan perencanaan tingkat pusat atau Kementerian/Lembaga maupun secara horizontal dengan perencanaan antara Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah mengacu dan melakukan penelaahan pada perencanaan tingkat pusat Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Penelaahan dokumen perencanaan juga dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dan rumusan strategi kebijakan pengembangan kepemudaan dan olahraga kedepan saling mendukung satu dengan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 128) ;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang salah satunya adalah pembentukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 67) ;

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 di Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang akan digunakan sebagai pedoman untuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga periode tahun 2025-2029

Adapun tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah untuk :

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2025-2029;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi berbatasan, dan Pemerintah Pusat;
3. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah kurun waktu Tahun 2025-2029;
4. Sebagai pedoman penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan.
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan ;

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis ini berdasarkan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2025 serta berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 0007/0001565 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini Bagian ini menyajikan data dan informasi terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dapat memberi gambaran kondisi umum kinerja perangkat daerah, disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan dalam lima tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024, serta menggambarkan permasalahan dalam pelayanan perangkat daerah serta Isu isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara singkat, harapan dan mimpi tentang hasil pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Jawa Tengah pada lima tahun mendatang.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga di Provinsi Jawa Tengah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor .... Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

2.1.1. Tugas

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
- Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ,,, Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Jawa Tengah

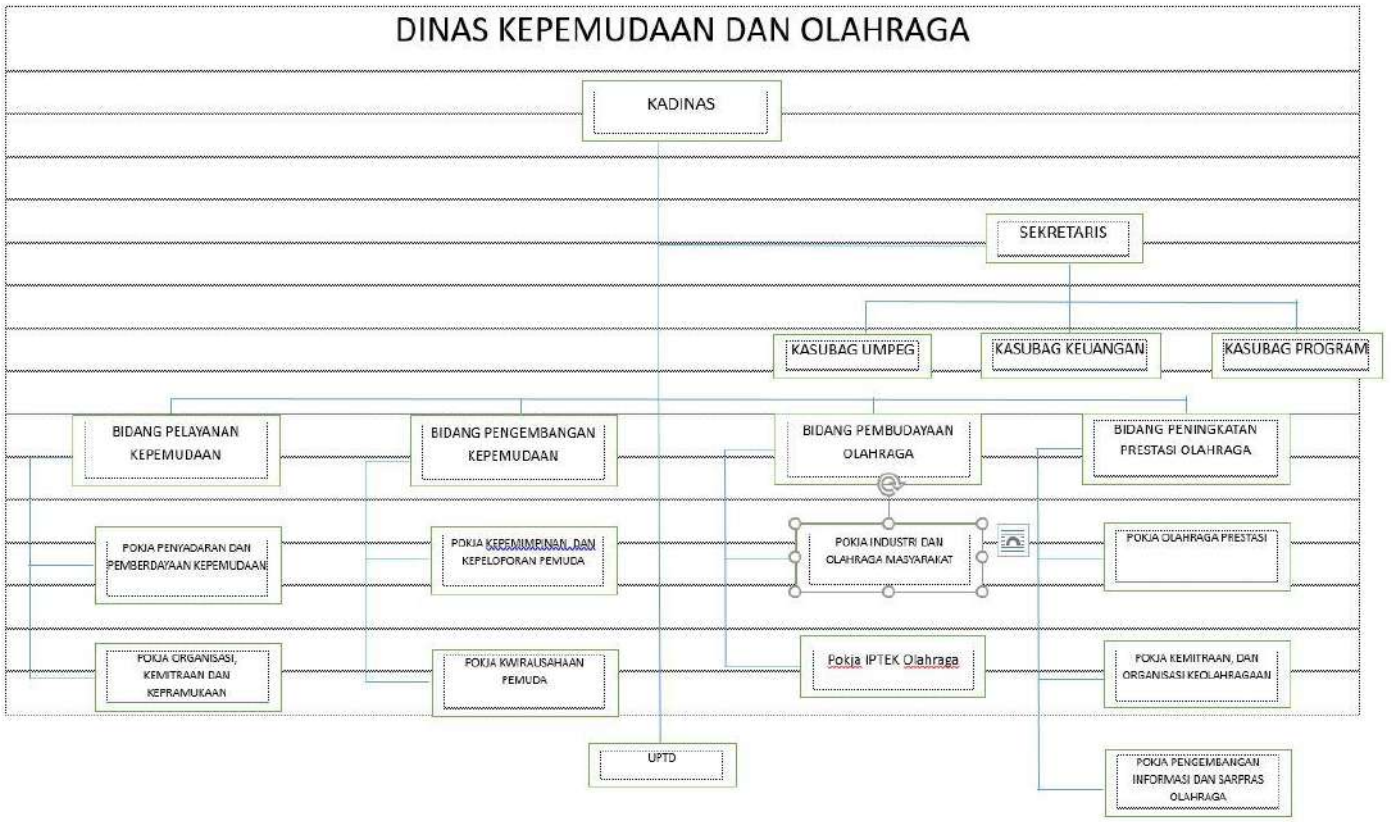

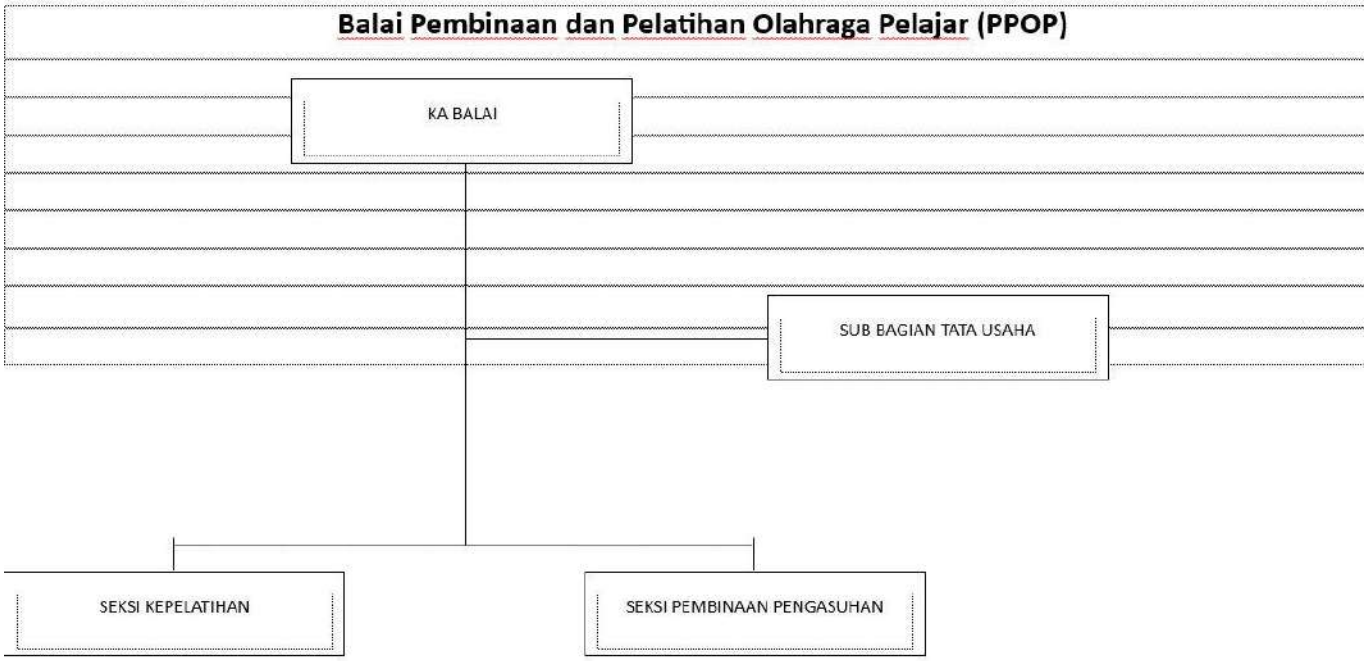

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah

2.1.4. Tugas Dan Fungsi Jabatan

Berikut uraian tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ,... Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah : (sesuai SOTK baru)

1. Kepala Dinas

   A. Tugas

   Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

   B. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

   - perumusan kebijakan bidang pelayanan kepemudaan, pengembangan kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan keolahragaan;
   - pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kepemudaan, pengembangan kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan keolahragaan;
   - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kepemudaan, pengembangan kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan keolahragaan;
   - pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
   - pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

   A. Tugas

   Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

   B. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

   - Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
   - Penyampaian bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan dinas;

- Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- Penyiapan bahan koordinasi pelaksanan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- Penyiapan bahan pengelolaan barang milik daerah / kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan tugasnya;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dengan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
- Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data informasi di Bidang Program;
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Keuangan meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;

- menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di Lingkungan Dinas;
- menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian, meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pelayanan Kepemudaan

A. Tugas Bidang Pelayanan Kepemudaan

Bidang Pelayanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemudaan dan Kemitraan dan kelembagaan Pemuda.

B. Fungsi Bidang Pelayanan Kepemudaan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kepemudaan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Kepemudaan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,evaluasi dan pelaporan bidang Kemitraan dan kelembagaan Pemuda; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda

- Seksi Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda, meliputi :
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda;
- menyiapkan bahan pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya, hukum iman taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- menyiapkan bahan peningkatan kapasitas moral dan intelektual serta kemandirian;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pencegahan bahaya destruktif, empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2 Seksi Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan

Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda, meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda;
- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah dan organisasi kepramukaan;
- menyiapkan bahan pemberdayaan organisasi kepramukaan, penyusunan dan penerapan standar teknis kelembagaan dan kemitraan Pemuda;
- menyiapkan bahan dan dukungan sarana dan prasarana kepemudaan tingkat daerah provinsi; menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi tingkat Daerah;
- menyiapkan bahan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan tingkat daerah;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda: dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengembangan Kepemudaan

A. Tugas Bidang Pengembangan Kepemudaan

Bidang Pengembangan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemudaan dan Kemitraan dan kelembagaan Pemuda.

B. Fungsi Bidang Kepemudaan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;

- pelaksanaan kebijakan terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
- monitoring dan evaluasi terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
- pelaporan dan rekomendasi terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

- Seksi Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, meliputi :
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
- menyiapkan bahan Penyelenggaraan Pemuda pelopor
- menyiapkan bahan Pertukaran pemuda antar Negara
- menyiapkan bahan Pertukaran pemuda antar propinsi
- menyiapkan bahan Program pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda.
- menyiapkan bahan Penyelenggaraan Kepemimpinan Pemuda
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Seksi Kewirausahaan pemuda

Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewirausahaan Pemuda, meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kewirausahaan Pemuda;

- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Kewirausahaan Pemuda;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah dan organisasi kepramukaan;
- menyiapkan bahan Inkubator kewirausahaan pemuda
- menyiapkan bahan Pelatihan kewirausahaan pemuda
- menyiapkan bahan Program Zilenial Jawa Tengah
- menyiapkan bahan Pemberian apresiasi pemuda
- menyiapkan bahan Fasilitasi pengembangan dan perawatan sarpras kepemudaan
- menyiapkan bahan Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha
- Pitching investors kepemudaan
- menyiapkan bahan Pengembangan database kepemudaan (IPP);
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda: dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Bidang Peningkatan Prestasi olahraga

A. Tugas

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Prestasi Olahraga;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi dan Sarana Prasarana Olahraga;

- pelaksanaan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1 Seksi Olahraga Prestasi

Seksi Olahraga Olahraga Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Prestasi, meliputi:

- menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang Olahraga Prestasi;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Olahraga Prestasi;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi melalui festival dan kompetisi olahraga prestasi tingkat Daerah;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan berkala berbagai cabang olahraga prestasi melalui proses pemanduan, pembibitan dan pembinaan prestasi dengan pemanfaatan;
- menyiapkan bahan penyusunan panduan dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang olahraga prestasi; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

5.2 Seksi Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga

Seksi Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga, meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga;

- Menyiapkan bahan Penyusunan data keolahragaan
- Menyiapkan bahan Penerapan teknologi informasi olahraga
- Menyiapkan bahan Integrasi sistem informasi keolahragaan
- Menyiapkan bahan Pemetaan dan kalender event olahraga
- Menyiapkan bahan Fasilitasi penyediaan sarana prasarana keolahragaan
- Penyusunan kebijakan pengembangan keolahragaan
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.3 Seksi Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan

Seksi Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengembangan Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan;
- menyiapkan bahan koordinasi *stakeholder* keolahragaan dan layanan khusus;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kapasitas organisasi olahraga;
- menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi bidang keolahragaan di tingkat Daerah;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.

6. Bidang Pembudayaan olahraga

A. Tugas

Bidang Pembudayaan olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan

pelaporan di Bidang Pembudayaan olahraga.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembudayaan olahraga n mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- pelaksanaan kebijakan terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- monitoring dan evaluasi terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- pelaporan dan rekomendasi terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

6.1 Seksi Industri dan Olahraga Masyarakat

Seksi Industri dan Olahraga Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Industri dan Olahraga Masyarakat, meliputi:

- menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang Industri dan Olahraga Masyarakat;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Industri dan Olahraga Masyarakat;
- menyiapkan bahan Peningkatan kebugaran masyarakat
- Penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat dan layanan khusus
- menyiapkan bahan Pengiriman peserta pada kegiatan olahraga masyarakat dan layanan khusus di tingkat nasional
- menyiapkan bahan Penyelenggaraan dan fasilitasi olahraga pariwisata

- menyiapkan bahan Peningkatan kerjasama dengan stakeholder olahraga masyarakat
- menyiapkan bahan Penyelenggaraan sport tourism
- menyiapkan bahan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
- menyiapkan bahan Pengembangan produk barang dan jasa olahraga penunjang industri olahraga
- menyiapkan bahan Penyusunan dokumen dampak ekonomi industri olahraga melalui event olahraga
- menyiapkan bahan Penyusunan dokumen juklak dan juknis di bidang olahraga pendidikan
- menyiapkan bahan Penyelenggaraan kegiatan olahraga pendidikan
- menyiapkan bahan Pengiriman peserta pada kegiatan olahraga pendidikan di tingkat nasional
- Penyelenggaraan festival olahraga pendidikan;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang Industri dan Olahraga Masyarakat; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

6.2 Seksi IPTEK Olahraga

Seksi IPTEK Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang IPTEK Olahraga;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang IPTEK Olahraga;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan IPTEK Olahraga;
- Menyiapkan bahan Penyusunan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
- Menyiapkan bahan Penyusunan kajian dampak olahraga
- Menyiapkan bahan Pengembangan dan Penerapan IPTEK Olahraga menuju prestasi olahraga
- Menyiapkan bahan Penyusunan strategi pengembangan olahraga
- Pemetaan internal dan eksternal potensi olahraga prestasi dan masyarakat

- Menyiapkan bahan Penyusunan formulasi berdasarkan analisis menuju peningkatan index dan performa
- Menyiapkan bahan Penyusunan data keolahragaan
- Menyiapkan bahan Penerapan teknologi informasi olahraga
- Menyiapkan bahan Integrasi sistem informasi keolahragaan
- Pemetaan dan kalender event olahraga
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang IPTEK Olahraga; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah

2.2.1. Sumber Daya Kepegawaian

Sumber Daya Kepegawaian berdasarkan eselon, selengkapnya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	II	1
2	III	6
3	IV	6
	JUMLAH	**13**

Sumber : Profil Kepegawaian SIMPEG Provinsi Jawa Tengah (Februari 2025)

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah terdapat 13 jabatan struktural. Untuk data lengkap pejabat struktural yang ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yaitu terdiri dari Kepala Dinas pada eselon II; Sekretariat, Kepala Bidang Pelayanan Kepemudaan, Kepala Bidang Pengembangan Kepemudaan, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, Kepala UPT Balai Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar, pada eselon III; serta Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Program Keuangan, Kepala Sub Bagian Program Umum Dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Kepelatihan, Kepala seksi Pembinaan Dan pengasuhan pada eselon IV

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	26
2	Bidang Pelayanan Kepemudaan	12
3	Bidang Pengembangan Pemuda	14
4	Bidang Pembudayaan Olahraga	12
5	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	10
6	Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	33
Jumlah		**107**

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Maret 2025)

Sedangkan data pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	19
2	Golongan III	54
3	Golongan II	34
4	Golongan I	0
	Jumlah	**107**

Sumber : SIMPEG Provinsi Jawa Tengah (Maret 2025)

2.2.2. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tanah	5	1. Kantor Jl. Ki Mangunsarkoro No. 12 2. Komplek Jatidiri 3. Museum Api Abadi Mrapen 4. Tanah Jl. Veteran Kota Salatiga (bangunan untuk latihan sepak takraw) 5. Tanah Desa Jonggrangan Kab. Klaten (untuk latihan panahan)
2	Peralatan dan mesin	4	1. Micro bus 2. Mini bus 3. Sepeda motor 4. Mpv
3	Bangunan Gedung	12	1. Masjid Jatidiri 2. Kantor Jl. Ki Mangunsarkoro No. 12 3. Gardu A,B,C 4. Wisama Pelatih 5. Gor Jatidiri 6. Stadion Jatidiri 7. Gedung Serba Guna Mrapen 8. Lap Tenis Indoor 9. Sasana Tinju 10. Lap. Sepatu roda 11. Asrama atlet A, B 12. SKO
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	3	1. Jalan Lingkungan Komplek Jatidiri 2. Jembatan Komplek Jatidiri 3. Listrik Komplek Jatidiri
5	Aset Tetap Lainnya	3	1. Buku Perpustakaan 2. Patung Menteri Supeno Jatidiri 3. Patung Burung Kepodang
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3	1. DED Panjat Tebing 2. DED Lapangan panahan 3. DED Asrama atlet B dan C 4. DED Sepak Takraw

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Maret 2025)

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Pencapaian Kinerja Indikator

Berdasarkan analisis terhadap realisasi capaian indikator kinerja diketahui bahwa rata-rata hasil capaian indikator diatas target indikator kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian urusan pemuda dan olahraga menunjukkan kinerja yang baik. Gambaran Umum hasil kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk urusan pemuda dan olahraga tahun 2019-2024 dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut ini:

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TUJUAN																					
	RENSTRA 2019-2023																					
1.	*Sport Development Index (SDI)*			%	0.58	0,60	0.61	0.63	0.65	0.42	0.55	0,60	0.61	0.37	0,37	0.4	94.83	100	100	58.73	59,92	95.23
2.	Indeks Pembangunan Pemuda			%	50.20	50.25	54.50	55.15	55.15	56.85	52.17	54.50	54.50	54.50	55,15	58.33	103.92	108.46	100	98.82	100	102.6
3.	Nilai Kepuasan Masyarakat			%	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	80	100	N/A	100	100	100	80	100	N/A
	RPD 2024-2026																					
1.	*Sport Development Index (SDI)*			%	0.58	0,60	0.61	0.63	0.65	0.42	0.55	0,60	0.61	0.37	0,37	0.4	94.83	100	100	58.73	59,92	95.23
2.	Indeks Pembangunan Pemuda			%	50.20	50.25	54.50	55.15	55.15	56.85	52.17	54.50	54.50	54.50	55,15	58.33	103.92	108.46	100	98.82	100	102.6
3.	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)			Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79.31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79.31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
	SASARAN																					
	RENSTRA 2019-2023																					
1.	Tingkat Prestasi Olahraga			Peringkat	N/A	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
2.	Peningkatan			Level	4	6	5	N/A	N/A	N/A	4	6	5	N/A	N/A	N/A	100	100	100	N/A	100	N/A

	prestasi olahraga tingkat nasional																					
3.	Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan dan Kemandirian Ekonomi Pemuda			%	N/A	N/A	N/A	38.55	51.04	N/A	N/A	N/A	N/A	38.55	51,04	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
4.	Persentase kapasitas dan kemandirian pemuda			%	11.42	15,41	20.5	N/A	N/A	N/A	11.42	15,41	20,5	N/A	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A
5.	Nilai Kepuasan Masyarakat			Laporan	100.00	100	100	100	100	N/A	100.00	100	100	80	100	N/A	100	100	100	80	100	N/A
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			%	62.00	64.00	70	73.5	75,46	N/A	74.03	75.13	76,06	78.31	76,46	N/A	119.40	117.39	108,65	106.54	100	N/A
	RPD 2024-2026																					
1.	Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda			%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	497.74
2	Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda			%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	37.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	134.23
3.	Peringkat nasional pada kejuaraan multievent			Peringkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400
4.	Persentase tingkat kebugaran masyarakat			%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.183	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98.36
5.	Indeks Manajemen Risiko			Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
6.	Indeks Kepuasan			Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100

	Masyarakat																					

NO	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	Target IKK	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	PROGRAM																					
	RENSTRA 2019-2023																					
1.	Persentase capaian kapasitas kepemudaan	-	-	%	20	39,68	59,78	79,89	100	N/A	20	26,99	40,5	64,06	100	N/A	100	68,02	50,69	80.18	100	N/A
2.	Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	-	-	%	N/A	6,52	9,78	13,04	16,3	N/A	N/A	3,84	2,27	13,04	16,30	N/A	N/A	39,26	17,40	100	100	N/A
3.	Persentase peningkatan prestasi olahraga	-	-	%	5	36,67	40	43,33	45	N/A	5	0	15	43,33	45	N/A	100	0	34,61	100	100	N/A
4.	Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	-	-	%	9,44	11,11	12,78	13,89	15	N/A	31,12	2	9,19	13,89	15	N/A	329,66	18,00	71,90	100	100	N/A
5.	Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	-	-	%	N/A	62,5	87,5	100	100	N/A	N/A	50	50	100	100	N/A	N/A	80	57,14	100	100	N/A
6.	Persentase capaian even olahraga rekreasi	-	-	%	N/A	50	70	90	N/A	N/A	N/A	40	30	-	N/A	N/A	N/A	80	42,85	0	N/A	N/A
7.	Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten	-	-	%	N/A	35,7	45,1	54,5	N/A	N/A	N/A	28,9	15	-	N/A	N/A	N/A	80,95	33,25	0	N/A	N/A
	RPD 2024-																					

	2026																				
1.	Jumlah wirausaha muda mandiri	-	-	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
2.	Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	-	-	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
3.	Persentase peningkatan perolehan medali	-	-	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28,18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	106,46
4.	Jumlah masyarakat yang bugar	-	-	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
5..	Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	-	-	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	140
6.	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	-	-	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
7.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	-	-	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
8.	Persentase tingkat pelayanan umum,	-	-	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100

	kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah																				

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah

Capaian kinerja untuk urusan pemuda dan olahraga dilihat dari tabel 2.5 diatas secara umum menunjukkan hasil yang baik. Tahun 2019 s/d 2023 dari 3 indikator tujuan terdapat 3 indikator yang sesuai target yaitu indeks pembangunan pemuda dan nilai kepuasan masyarakat. terdapat 1 indikator yang belum memenuhi target yaitu indeks pembangunan keolahragaan. periode tahun 2024 dari 3 indikator tujuan terdapat 2 indikator yang tercapai yaitu indeks pembangunan pemuda dan indeks reformasi birokrasi (Perangkat Daerah). Terdapat 1 indikator yang belum tercapai yaitu Indeks Pembangunan Olahraga.

Tahun 2019-2023 dari total 6 indikator sasaran seluruhnya 5 indikator telah sesuai target yaitu persentase capaian kapasitas kepemudaan dan kemandirian ekonomi pemuda, tingkat prestasi olahraga, peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional, nilai kepuasan masyarakat, nilai sakip perangkat daerah. Terdapat 1 indikator yang tidak tercapai yaitu persentase kapasitas dan kemandirian pemuda.

Periode Tahun 2024 dari 7 indikator terdapat 6 indikator yang sesuai target yaitu persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda, persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda, peringkat nasional pada kejuaraan multievent, indeks manajemen risiko indeks, dan kepuasan masyarakat sedangkat 1 indikator yang belum mencapai target yaitu persentase tingkat kebugaran masyarakat.

Periode tahun 2019-2023 dari 7 target indikator program, tercapai 5 indikator program yaitu persentase capaian kapasitas pemuda, persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda, persentase peningkatan prestasi olahraga, persentase atlet PPLOP yang berprestasi, persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik dan Tahun 2023 terdapat 2 indikator yang tidak dapat diukur dikarenakan adanya perubahan pada indikator capaian yaitu Persentase capaian event olahraga rekreasi dan Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten. Sedangkan pada Periode Tahun 2024 dari 8 target indikator program telah tercapai semua yaitu Jumlah wirausaha muda mandiri, Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi, Persentase peningkatan perolehan medali, Jumlah masyarakat yang bugar, Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi, Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah, Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah, dan Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Anggaran

Evaluasi Kinerja Anggaran secara makro dapat dilihat dari data realisasi anggaran dalam kurun waktu 2019-2024 baik jumlah Anggaran APBD Menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung serta Jumlah Anggaran Belanja Langsung pada urusan Pemuda dan Olahraga dan urusan pariwisata yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Realisasi Anggaran Urusan Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Rp. (000)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rp. (000)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata – rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	2.800.000	1.567.911	250.885	2.142.000	5.500.000	5.505.000	2.637.116,934	1.036.391,065	381.292,650	2.798.197	1.147.929,050	2.264.063,500	94,18	66,10	151,98	130,63	20,87	41,13	130,44	91,37
Belanja	538.315.715	74.088.366	262.910.421	288.448.798	256.507.945	328.974.312	500.985.645,011	65.039.442,605	254.357.580,554	274.212.100,329	250.734.799,899	322.156.100,824	93,07	87,79	97,75	95,06	4,35	92,93	32,59	38,63
Urusan Pora	457.308.280	178.351.180	198.294.176	240.050.270	203.987.579	238.082.826	429.778.822		195.583.581	229.561.839	199.398.871	234.927.010	93,98		98,63	95,63	97,75	98,67		
Pembiayaan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 2.6 diatas, diketahui bahwa secara umum realisasi pendapatan sebagai kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019-2024 mengalami pertumbuhan yang positif, dapat dilihat pada tabel rata-rata pertumbuhan. Meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebagai dampak dari pandemi Covid 19 yang mana hampir di seluruh komponen realisasi pendapatan menurun. Tahun 2022 realisasi pendapatan meningkat sampai dengan tahun 2023, namun Tahun 2024 pendapatan turun hal ini dikarenakan daya saing terhadap usaha hotel/penginapan yang semakin pesat, hal ini berdampak bagi hotel yang kita kelola untuk bersaing, karena kondisi sarpras hotel/penginapan milik Pemprov masih dibawah standart hotel lainnya pada lokasi yang sama, dengan tarif harga yang hampir sama ; Di daerah Kopeng, Baturaden, dan Tawangmangu Karanganyar tingkat kunjungan wisata tinggi tetapi tingkat hunian yang rendah; Pemanfaatan Stadion Kawasan Jatidiri yang tidak dapat digunakan karena berkaitan dengan adanya renovasi / perbaikan Stadion Jatidiri dari Kementrian PUPR s.d pertengahan Desember 2024 (kurang lebih 8 bulan); beberapa venue juga digunakan untuk latihan atlet pelajar Jateng, Pelatda dan Pelatnas ; Venue Kolam Renang tidak dapat dibuka untuk umum karena hanya ada kolam tanding sehingga pemakaian hanya untuk pelaksanaan kejuaraan dan latihan club; sera adanya Penggunaan oleh Pemerintah yang tidak dikenakan biaya seperti event POPDA dan Porprov KORPRI

Anggaran belanja turun pada tahun 2020 karena adanya kebijakan refocusing yang difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 untuk penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat. Mulai tahun 2021 sampai tahun 2022 anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengalami kenaikan namun tahun 2023 turun kembali dikarenakan adanya kebijakan penanganan 9 Program Prioritas Pj. Gubernur Jawa Tengah, Tahun 2024 anggaran mengalami kenaikan kembali untuk melaksanakan Program Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing UMKM di Sektor Ekonomi Kreatif.

2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan capaian kinerja pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah serta capaian realisasi anggaran tahun 2019-2024 urusan pemuda dan olahraga, dapat dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan sebagiberikut :

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Daya saing pemuda masih	1. Belum Optimalnya	1. Tingginya Perilaku negatif pemuda (kenakalan

	rendah	partisipasi dan kepemimpinan pemuda	pemuda, narkoba/NAPZA) 2. Kuranya Jiwa Nasionalisme (Radikalisme, Toleransi) 3. Rendahnya Jiwa Kepemimpinan dan kepeloporan 4. Masih rendahnya prestasi kepemudaan 5. Rendahnya data kepemudaan 6. Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan kreativitas pemuda
		2. Masih Rendahnya lapangan dan kesempatan kerja pemuda	1. Rendahnya tingkat pendidikan pemuda 2. Rendahnya tingkat keterampilan dan 3. soft skill pemuda 4. Kurangnya kemandirian pemuda dalam berwirausaha 5. Minimnya penghargaan pemuda dan organisasi pemuda berprestasi 6. Kurangnya pengetahuan dan pemanfaatan Teknologi Informasi
2.	Belum Optimalnya Peningkatan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas SDM	1. Rendahnya kebugaran masyarakat	1. Minimnya perhatian terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga 2. Kurang optimalnya pembudayaan olahraga di masyarakat 3. Belum optimalnya dukungan stakeholder terkait (kemitraan)
		2. Belum optimalnya	1. Minimnya perhatian Kurangnya jumlah sarana

		prestasi Olahraga	dan prasarana olahraga yang memenuhi standar 2. Rendahnya kualitas SDM olahraga (atlet, pelatih, wasit, organisasi keolahragaan) 3. Belum optimalnya pola pembibitan dan pembinaan olahraga yang berkesinambungan 4. Kurangnya apresiasi/penghargaan SDM olahraga 5. Kurangnya kesadaran stakholder exsternal untuk mengembangkan industri olahraga secara profesional 6. Rendahnya pemanfatan basis data keolahragaan

5) **Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu strategis pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga di Provinsi Jawa Tengah diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berbagai isu strategis global, nasional, maupun daerah yang tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah lima tahun ke depan dengan pertimbangan. Dalam penentuan isu strategis daerah Jawa Tengah lima tahun ke depan terkait dengan isu-isu yang ada Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Berbagai isu tersebut tergambarkan dalam tabel isu strategis global, nasional, dan daerah sebagai berikut.

Tabel 2.8

Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 4 tahun 2021 tentang pembangunan dan pengembangan kepemudaan 2. Kartu Zillenia untuk akses pelatihan, sertifikasi, bisnis dan permodalan	1. Karakter pemuda yang masih lemah; 2. Kurangnya *hardskill* dan *softskill* pemuda; 3. Tingginya tingkat penganggguran pemuda; 4. Belum sinerginya implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam menciptakan pemuda yang berdaya saing; 5. elum optimalnya kerjasama dan kemitraan dengan organisasi atau lembaga permodalan (CSR)	1. Masih tingginya tingkat pengangguran di Jawa Tengah **2.** Masih banyaknya remaja yang putus sekolah dan bekerja sebagai PSK		1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP): Reviu Capaian dan Pemutakhiran Metodologi 2. Partisipasi pemuda menunjukkan penurunan, baik dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, maupun aktif berorganisasi 3. Kualitas Pendidikan Pemuda Belum Optimal 4. Tata Kelola Pembangunan Pemuda yang Belum Efektif dan Efisien 5. Partisipasi Pemuda Dalam Ketenagakerjaan Masih Minim 6. Persoalan kesehatan fisik dan mental pemuda	1. Migrasi pemuda, 2. Kesenjangan digital, 3. Keterbatasan akses informasi dan ketrampilan 4. Kurangnya partisipasi politik dan ekonomi.	1. Kurangnya dukungan

2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dapat mendukung peningkatan prestasi prestasi olahraga 3. Sarpras Olahraga yang mewadai (Kawasan jatidiri)	1. Kurangnya pembudayaan olahraga; 2. Menurunnya prestasi olahraga; 5. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga berstandar;			1. Olahraga belum menjadi budaya masyarakat 2. Minimnya prestasi olahraga di tingkat dunia 3. Proyek pada aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya belum masif	1. Implementasi DBON 2. Kesetaraan gender dan steriotik yang menghabat prestasi, 3. Pentingnya dukungan stakholder untuk meningkatkan daya saing olahraga 4. Pentingnya melestarikan olahraga masyarakat bagi generasi muda .	1. Kurangnya fasilitas pelatihan yang memadahi 2. Dukungan belum optimal baik dari pemerintah maupun masyarakat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dari pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah "***Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan***". Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan yang akan dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2025–2029, antara lain:

Tujuan I : **Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Kepemudaan yaitu Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dan Angka Lapangan dan Kesempatan Kerja Pemuda.

Tujuan II : **Meningkatkan Daya Saing Keolahragaan**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Keolahragaan yaitu Tingkat Kebugaran dan Prestasi Olahraga Tingkat Nasional.

Tujuan III : **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan Kesekretariatan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah serta Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka		58,33	58,25	60,25	61,05	61,55	62,15	62,60	62,60
	Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan	1. Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda.	Angka		50	38,75	47,20	47,60	47,90	48,20	48,80	48,80
		2. Angka Lapangan dan Kesempatan Kerja Pemuda	Angka		55	11,5	45,80	46,10	46,40	46,70	47,10	47,10
Meningkatkan Daya Saing Keolahragaan		Indek Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka		0,385	0,387	0,389	0,390	0,391	0,392	0,393	0,393
	Meningkatnya Pembangunan Keolahragaan	1. Tingkat Kebugaran	%		0,18	0,202	0,16	0,163	0,166	0,17	0,173	0,173
		2. Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	%		N/A	N/A	25	30	35	37	40	40
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka		79,31	80,41	81,55	82,05	82,55	83,05	83,55	83,55
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat Perangkat Daerah	Angka		3,01	3,02	3,03	3.04	3.05	3,06	3,07	3,07
	2. Meningkatnya kualitas pengelo	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka		75	76	77	78	79	80	81	81

	laan risiko perang kat											

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran**	**Satuan**	**Kondisi Awal**		**Target Capaian**						**Kondisi Akhir**
				2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka		79,31	80,41	81,55	82,05	82,55	83,05	83,55	83,55
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat Perangkat Daerah	Angka		3,01	3,02	3,03	3.04	3.05	3,06	3,07	3,07
	2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka		75	76	77	78	79	80	81	81

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari rencana strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan disajikan secara lengkap dalam tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan	Meningkatkan layanan dasar kepemudaan	1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemitraan dan Kepramukaan 3. Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 4. Kewirausahaan dan Kemitraan Pemuda 5. Pengembangan Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja
2	Meningkatkan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Pembangunan Keolahragaan	Meningkatkan prestasi olahraga tingkat nasional/ internasional	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi 6. Pengembangan dan Penguatan dan Pembinaan *E-Sport* Jawa Tengah sebagai olahraga prestasi 7. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Dunia Usaha dalam pembinaan olahraga, seperti sponsor acara

				olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program "PERUSAHAAN ASUH"

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan kebugaran masyarakat	1. Pengembangan Industri dan Olahraga Masyarakat 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga *3.* Penyelenggaran *Sport Tourism* 4. Pengembangan *Sport Center* di setiap kecamatan 5. Mendukung dan menjadikan Kegiatan Tarkam (Pertandingan Antar Kampung) masuk ke dalam Kalender Olahraga Provinsi

Selain itu penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijkan juga disajikan pentahapan pembangunan yang dimaksudkan untuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2030. Prioritas dalam setiap tahapan mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pentahapan dimaksud disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatkan kualitas Infrastruktur pelayanan kepemudaan dan pembudayaan gaya hidup sehat

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
Penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan, mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan prasarana sarana olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan; dan peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;	peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pembinaan atlet potensial, pembinaan cabang olahraga unggulan, peningkatan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan prasarana sarana olahraga cabor unggulan dan peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun startup berbasis syariah;	peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, peningkatan pembinaan atlet potensial, peningkatan prasarana sarana olahraga cabor unggulan; dan peningkatan partisipasi dan pembangunan pemuda dalam bidang ekonomi berbasis potensi desa dan ekonomi hijau;	peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, pemerataan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan kualitas SDM keolahragaan, peningkatan pembinaan atlet potensial dan peningkatan daya saing pemuda;	perwujudan kebugaran masyarakat, daya saing, dan prestasi olahraga dan perwujudan daya saing pemuda;

4.2 Manajemen Risiko Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.4
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko
Strategis Dispora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda	Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda	Hasil pelatihan kewirausahaan tidak ditindaklanjuti oleh peserta	12	Keterbatasan modal	Tingkat keberhasilan kewirausahaan rendah	Melakukan upaya kemitraan dengan stakeholder yang dapat mendukung kegiatan kewirausahaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	Persentase partisipasi dan kepemimpinan	Rendahnya kesadaran pemuda untuk partisipasi	9	Kurangnya sosialisasi, pendampingan	Kepesertaan pemuda dalam organisasi rendah	Melakukan tindakan penyadaran	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	Peringkat nasional	Perpindahan/mutasi atlet	12	Jaminan kesejahteraan hidup atlet yang masih rendah	Peringkat nasional kejuaraan multievent menurun	Memberikan insentif kepada atlet	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa	Setiap Tahun

							Tengah	
Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat	Persentase Tingkat kebugaran masyarakat	Budaya berolahraga masyarakat yang masih rendah	9	Sosialisasi pembudayaan dan pemassalan olahraga kepada masyarakat masih kurang	Tingkat kebugaran masyarakat kurang maksimal, banyak masyarakat yang tidak sehat dan rentan sakit	Membudayakan olahraga masyarakat	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Mengacu pada rencana program dalam Renstra Tahun 2025-2029 Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1.1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- **a.** Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
- **b.** Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
- **c.** Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
- **d.** Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi

e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi

f. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi

g. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi

h. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi

1.2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda

b. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi

2. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

2.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha

b. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi

c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus

2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Sub Kegiatan :

a. Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga

b. Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi

c. Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi

2.3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional

Sub Kegiatan :

a. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga

b. Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
c. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
d. Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
e. Seleksi Atlet Daerah

2.4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Sub Kegiatan :
a. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
b. Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

3.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
c. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
d. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

3.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

3.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Mebel
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatanm dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Kepemudaan dan Olahraga *										38.889.860.000		41.620.707.000		43.753.765.000		44.490.466.000		45.288.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga *	Angka	N/A	81,55		82,05		82,55		83,05		83,55		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangka									980.000.000		1.180.000.000		1.180.000.000		1.180.000.000		1.180.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

	t daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga **																		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga **	Angka	N/A	3,03	980.000.000	3,04	1.180.000.000	3,05	1.180.000.000	3,06	1.180.000.000	3,07	1.180.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								980.000.000		1.180.000.000		1.180.000.000		1.180.000.000		1.180.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	N/A	100	980.000.000	100	1.180.000.000	100	1.180.000.000	100	1.180.000.000	100	1.180.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

						***													
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****							980.000.000		1.180.000.000		1.180.000.000		1.180.000.000		1.180.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	N/A	100	980.000.000	100	1.180.000.000	100	1.180.000.000	100	1.180.000.000	100	1.180.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****						500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	N/A	5	500.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Kepemudaan dan Olahrag

					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah *****													a
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****						400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksanaanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	N/A	3	400.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****						40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksanaanya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	25	25	40.000.000	25	40.000.000	25	40.000.000	25	40.000.000	25	40.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****						40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

					Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga **									37.909.860.000		40.440.707.000		42.573.765.000		43.310.466.000		44.108.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga **	Angka	N/A	77	37.909.860.000	78	40.440.707.000	79	42.573.765.000	80	43.310.466.000	81	44.108.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***							33.610.860.000		36.105.707.000		37.979.765.000		38.687.466.000		39.230.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga ***	%	N/A	86	33.610.860.000	87	36.105.707.000	88	37.979.765.000	89	38.687.466.000	90	39.230.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						17.765.860.000		18.812.707.000		19.800.000.000		19.800.000.000		19.800.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	N/A	12	17.765.860.000	12	18.812.707.000	12	19.800.000.000	12	19.800.000.000	12	19.800.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

						yang disusun ****													
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****						17.000.000.000		18.000.000.000		19.000.000.000		19.000.000.000		19.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	N/A	100	17.000.000.000	100	18.000.000.000	100	19.000.000.000	100	19.000.000.000	100	19.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						765.860.000		812.707.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	12	765.860.000	12	812.707.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Administrasi Barang Milik Daerah pada							300.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

			Perangkat Daerah ****																
					Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	12	300.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						300.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	300.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							300.000.000		325.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Meningkatnya layanan administrasi	Persentase layanan administrasi	%	N/A	100	300.000.000	100	325.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN	

					kepegawaian perangkat daerah	kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****													KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****						100.000.000		100.000.000		0		0		0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	100	100.000.000	100	100.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****						0		0		0		0		0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Monitoring,						25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	Dinas Kepem	

				Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	udaan dan Olahraga	
					Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	N/A	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	N/A	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

					Terlaksanya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****						150.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	100	150.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							1.690.000.000		1.990.000.000		2.265.000.000		2.497.466.000		2.790.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

					Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	1.690.000.000	100	1.990.000.000	100	2.265.000.000	100	2.497.466.000	100	2.790.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	50.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk	Paket	N/A	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	13	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN	Dinas Kepemudaan dan Olahrag

					pan Kantor	apan Kantor yang Disediakan *****												KEPEGAWAIAN	a
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						150.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	150.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediak	Paket	N/A	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

						an *****													
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						200.000.000		200.000.000		225.000.000		207.466.000		250.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	12	200.000.000	12	200.000.000	12	225.000.000	12	207.466.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						1.000.000.000		1.250.000.000		1.500.000.000		1.750.000.000		2.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

					Terlaksanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	1.000.000.000	12	1.250.000.000	12	1.500.000.000	12	1.750.000.000	12	2.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksanya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksanya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

					Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD *****													
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							800.000.000		700.000.000		700.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	3	800.000.000	3	700.000.000	7	700.000.000	7	750.000.000	7	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						0		0		0		0		0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

					Tersediannya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pengadaan Mebel *****						200.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pengadaan Peralatan						100.000.00		100.000.00		100.000.00		100.000.00		100.000.00	Dinas Kepemudaan	

				dan Mesin Lainnya *****						0		0		0		0		0	dan Olahraga	
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****						500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							11.105.000.000		11.708.000.000		12.399.765.000		12.805.000.000		13.305.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan	Laporan	N/A	12	11.105.000.000	12	11.708.000.000	12	12.399.765.000	12	12.805.000.000	12	13.305.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI	

					sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	pemerintahan daerah yang disusun ****												AN	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						30.000.000		33.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	30.000.000	12	33.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						1.500.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	1.500.000.000	12	1.600.000.000	12	1.700.000.000	12	1.700.000.000	12	1.700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

				Kantor *****															
					Tersediaan ya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						9.500.000.000		10.000.000.000		10.594.765.000		11.000.000.000		11.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediaan ya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	9.500.000.000	12	10.000.000.000	12	10.594.765.000	12	11.000.000.000	12	11.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							1.650.000.000		2.170.000.000		2.190.000.000		2.210.000.000		1.960.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

					Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	26	1.650.000.000	26	2.170.000.000	26	2.190.000.000	26	2.210.000.000	26	1.960.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharaa dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	4	100.000.000	4	110.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000	4	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		310.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharaa dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	310.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pemeliharaan Mebel *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksanany a Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipeliharaa *****	Unit	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

				*****															
					Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksanya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						1.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.120.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	1.000.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
					Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	2	100.000.000	2	110.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								4.299.000.000		4.335.000.000		4.594.000.000		4.623.000.000		4.878.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas	

																		A	
					Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar ***	%	N/A	100	4.299.000.000	100	4.335.000.000	100	4.594.000.000	100	4.623.000.000	100	4.878.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						150.000.000		175.000.000		175.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah	Dokumen	N/A	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	

					pada perangkat daerah	pada perangkat daerah ****													
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						150.000.000		175.000.000		175.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Terlaksanany a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							248.000.000		252.000.000		261.000.000		265.000.000		270.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan	

																		Olahraga Pelajar Kelas A	
					Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	248.000.000	100	252.000.000	100	261.000.000	100	265.000.000	100	270.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar

																			Kelas A
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan	

																		Olahraga Pelajar Kelas A	
					Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						3.000.000		5.000.000		7.000.000		9.000.000		10.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	3.000.000	1	5.000.000	1	7.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

																			Pelajar Kelas A
				Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						25.000.000		27.000.000		29.000.000		31.000.000		35.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	12	25.000.000	12	27.000.000	12	29.000.000	12	31.000.000	12	35.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan	

																		Olahraga Pelajar Kelas A	
					Terlaksanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Terlaksanya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroni	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

					SKPD	k pada SKPD *****														Pelajar Kelas A
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Pengadaan Mebel *****						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000			Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan	

																		Olahraga Pelajar Kelas A	
					Tersediaan ya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Tersediaan ya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

																			Pelajar Kelas A
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan	

																			Olahraga Pelajar Kelas A	
					Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							2.056.000.000		2.058.000.000		2.308.000.000		2.308.000.000		2.558.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang	Laporan	N/A	12	2.056.000.000	12	2.058.000.000	12	2.308.000.000	12	2.308.000.000	12	2.558.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	

					perangkat daerah	disusun ****														
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						6.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	6.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						2.000.000.000		2.000.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		2.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan	

																		Olahraga Pelajar Kelas A	
					Tersediaan ya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.250.000.000	12	2.250.000.000	12	2.500.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Tersediaan ya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

																			Pelajar Kelas A
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							1.620.000.000		1.625.000.000		1.625.000.000		1.625.000.000		1.625.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	5	1.620.000.000	5	1.625.000.000	5	1.625.000.000	5	1.625.000.000	5	1.625.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Pemeliharaan Mebel *****						20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan	

																		Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Terlaksanya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipeliharaa *****	Unit	N/A	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharaa *****	Unit	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahrag

																			a Pelajar Kelas A
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Terlaksanaanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
Meningkatkan Daya Saing Keolahragaan *										139.850.000.000		160.175.000.000		165.168.000.000		147.675.000.000		168.700.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

						Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) *	Angka	0,385	0,389		0,39		0,391		0,392		0,393		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Meningkatnya Pembangunan Keolahragaan **									139.850.000.000		160.175.000.000		165.168.000.000		147.675.000.000		168.700.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
						Tingkat Prestasi Olahraga Tingkat Nasional **	%	N/A	25	118.850.000.000	30	138.175.000.000	35	143.668.000.000	37	123.675.000.000	40	143.200.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN ***								103.050.000.000		121.350.000.000		125.843.000.000		104.850.000.000		121.850.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
					Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional/ internasional	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional /Internasional ***	%	N/A	10	76.200.000.000	15	86.500.000.000	20	102.500.000.000	25	68.500.000.000	30	84.250.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	

			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional ****							200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
					Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi yang tervalidasi ****	Dokumen	N/A	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Pokja Pengembangan Informasi dan Sarana Prasarana Olahraga	
				Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi *****						200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
					Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di	Dokumen	N/A	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Pokja Pengembangan Informasi dan Saran	KOTA SEMARANG

						provinsi *****												a Prasarana Olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga ****							76.000.000.000		86.250.000.000		102.250.000.000		68.250.000.000		84.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
					Meningkatnya kualitas organisasi olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga ****	Organisasi	N/A	6	76.000.000.000	6	86.250.000.000	6	102.250.000.000	6	68.250.000.000	6	84.000.000.000	Pokja Pengembangan Informasi dan Sarana Prasarana Olahraga	
				Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait *****						75.500.000.000		85.750.000.000		101.750.000.000		67.750.000.000		83.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	

					Terlaksanya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait *****	Dokumen	N/A	4	75.500.000.000	4	85.750.000.000	4	101.750.000.000	4	67.750.000.000	4	83.500.000.000	Pokja Pengembangan Informasi dan Sarana Prasarana Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
				Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi *****						500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
					Terlaksanya Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi *****	Dokumen	N/A	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	Pokja Pengembangan Informasi dan Sarana Prasarana Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
					Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional/ internasio	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan	%	N/A	79	26.850.000.000	80	34.850.000.000	81	23.343.000.000	82	36.350.000.000	83	37.600.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang	

					nal	Latihan (Nasional /Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional /Internasional ***													Peningkatan Prestasi Olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi ****							9.850.000.000		15.850.000.000		9.850.000.000		9.850.000.000		9.850.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
					Meningkatnya pengembangan olahraga pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah sarpras olahraga kewenangan daerah provinsi ****	Unit	N/A	N/A	9.350.000.000	N/A	15.350.000.000	N/A	9.350.000.000	N/A	9.350.000.000	N/A	9.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	

				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi *****						9.350.000.000		15.350.000.000		9.350.000.000		9.350.000.000		9.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
					Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia *****	Unit	N/A	3	9.550.000.000	3	15.550.000.000	3	109.350.000.000	3	109.350.000.000	2	9.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

					Meningkatnya pengembangan olahraga pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen pembinaan dan pelatihan yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha/lembaga/instansi/swasta ****	Dokumen	N/A	N/A	500.000.000	N/A	500.000.000	N/A	500.000.000	N/A	500.000.000	N/A	500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha *****						500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	

					Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan *****	Unit	N/A	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga ****							6.000.000.000		7.500.000.000		3.500.000.000		9.000.000.000		3.750.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga Prestasi yang diselenggarakan level provinsi ****	Kegiatan	N/A	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	

				Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi *****						1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
					Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi *****	Kegiatan	N/A	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA
					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga	Jumlah keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga nasional ****	Buah	N/A	50	5.000.000.000	150	6.500.000.000	55	2.500.000.000	160	8.000.000.000	60	2.750.000.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	
				Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga *****						5.000.000.000		6.500.000.000		2.500.000.000		8.000.000.000		2.750.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	

					Terlaksanya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga *****	Orang	N/A	130	5.000.000.000	750	6.500.000.000	140	2.500.000.000	1000	8.000.000.000	150	2.750.000.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional ****							11.000.000.000		11.500.000.000		9.993.000.000		17.500.000.000		24.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
					Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional ****	Orang	N/A	700	11.000.000.000	700	11.500.000.000	900	9.993.000.000	700	17.500.000.000	750	24.000.000.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi						1.000.000.000		1.000.000.000		0		5.000.000.000		8.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pening	

				dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga *****														katan Prestasi Olahraga	
					Terlaksanya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga *****	Orang	N/A	25	1.000.000.000	25	1.000.000.000	N/A	0	50	5.000.000.000	100	8.500.000.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi *****						10.000.000.000		10.500.000.000		9.993.000.000		12.500.000.000		15.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
					Terlaksanya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	N/A	1000	10.000.000.000	1050	10.500.000.000	1100	9.993.000.000	1150	12.500.000.000	1200	15.500.000.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

						*****													
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN ***								15.800.000.000		16.825.000.000		17.825.000.000		18.825.000.000		21.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Meningkatnya prestasi olahraga pelajar tingkat nasional/ internasional	Persentase Atlet pelajar dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional ***	%	N/A	79	15.800.000.000	80	16.825.000.000	81	17.825.000.000	82	18.825.000.000	83	21.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga ****							1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan	

																		dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga	Jumlah keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga nasional antar PPLOP ****	Orang	N/A	50	750.000.000	55	750.000.000	60	750.000.000	65	750.000.000	70	1.000.000.000	Seksi Kepelatihan	
				Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga *****						750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		1.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Terlaksanaanya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraa	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraa	Orang	N/A	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	1.000.000.000	Seksi Kepelatihan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar

					n olahraga	n olahraga *****														Kelas A
					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga pelajar (PPLOP) yang diselenggarakan level provinsi ****	Kegiatan	N/A	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	1.000.000.000	Seksi Kepelatihan	
				Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi *****						750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		1.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara *****	Kegiatan	N/A	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	1.000.000.000	Seksi Kepelatihan	KOTA SEMARANG

			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional ****							14.300.000.000		15.325.000.000		16.325.000.000		17.325.000.000		19.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
					Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga Pelajar prestasi tingkat nasional (PPLOP) ****	Orang	N/A	222	14.000.000.000	222	15.000.000.000	222	16.000.000.000	222	17.000.000.000	222	19.000.000.000	Seksi Pembinaan dan Pengasuhan	
				Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) *****						14.000.000.000		15.000.000.000		16.000.000.000		17.000.000.000		19.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	

					Terlaksanya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) *****	Pelatda	N/A	222	14.000.000.000	222	15.000.000.000	222	16.000.000.000	222	17.000.000.000	222	19.000.000.000	Seksi Pembinaan dan Pengasuhan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
					Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional	Jumlah Atlet Daerah yang terseleksi ****	Orang	N/A	81	300.000.000	75	325.000.000	78	325.000.000	80	325.000.000	80	350.000.000	Seksi Kepelatihan	
				Seleksi Atlet Daerah *****						300.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	

					Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi *****	Orang	N/A	320	300.000.000	340	325.000.000	360	325.000.000	380	325.000.000	400	350.000.000	Seksi Kepelatihan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
						Tingkat Kebugaran **	%	N/A	0,16	21.000.000.000	0,163	22.000.000.000	0,166	21.500.000.000	0,17	24.000.000.000	0,173	25.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN ***								21.000.000.000		22.000.000.000		21.500.000.000		24.000.000.000		25.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga	
					Meningkatnya Tingkat Kebugaran Masyarakat	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir ***	%	N/A	0,34	21.000.000.000	0,345	22.000.000.000	0,35	21.500.000.000	0,355	24.000.000.000	0,36	25.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga	

			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi ****							1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga	
					Meningkatnya pengembangan olahraga pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen pembinaan dan pelatihan yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha/lembaga/ instansi/ swas ****	Kegiatan	N/A	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	Pokja Industri dan Olahraga Masyarakat	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkump						1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaa	

				ulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus *****														n Olahraga	
					Terselenggaranya Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus *****	Dokumen	N/A	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	Pokja Industri dan Olahraga Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga ****							17.500.000.000		18.500.000.000		18.000.000.000		20.500.000.000		22.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga	

					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga masyarakat yang diselenggarakan level provinsi (sportourisme) ****	Kegiatan	N/A	3	17.500.000.000	3	18.500.000.000	3	18.000.000.000	3	20.500.000.000	3	22.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga	
				Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi *****						17.500.000.000		18.500.000.000		18.000.000.000		20.500.000.000		22.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga	
					Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara *****	Kegiatan	N/A	10	17.500.000.000	10	18.500.000.000	10	18.000.000.000	10	20.500.000.000	10	22.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi							2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan	

			Tingkat Nasional ****															Olahraga	
					Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional	Jumlah Sport Science yang dikembangkan ****	Unit	N/A	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga	
				Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) *****						2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga	
					Terlaksanya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknolog	Pelatda	N/A	2	2.500.000.000	2	2.500.000.000	2	2.500.000.000	2	2.500.000.000	2	2.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga

					Keolahragaan (Sport Science)	i Keolahragaan (Sport Science) *****													
Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan *										26.450.000.000		35.750.000.000		28.300.000.000		28.450.000.000		28.689.013.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
						Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) *	Angka	N/A	60,25		61,05		61,55		62,15		62,6		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan **									26.450.000.000		35.750.000.000		28.300.000.000		28.450.000.000		28.689.013.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
						Angka Lapangan dan Kesempatan Kerja Pemuda **	Angka	N/A	45,8	8.250.000.000	46,1	9.300.000.000	46,4	8.300.000.000	46,7	8.300.000.000	47,1	9.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDA								8.250.000.000		9.300.000.000		8.300.000.000		8.300.000.000		9.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepem	

		AN ***																udaan	
					Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan ***	%	N/A	20,85	8.250.000.000	20,75	9.300.000.000	20,65	8.300.000.000	20,55	8.300.000.000	20,45	9.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi ****							8.250.000.000		9.300.000.000		8.300.000.000		8.300.000.000		9.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan	
					Meningkatnya Kemandirian Pemuda	Persentase pemuda wirausaha kerah putih (white collar) ****	%	N/A	0,56	3.500.000.000	0,59	4.000.000.000	0,62	3.500.000.000	0,65	3.500.000.000	0,68	4.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan	

																		Kepemudaan	
////////////////// ////////////////// //////////////				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi *****						3.500.000.000		4.000.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan	
					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda *****	Orang	N/A	1000	3.500.000.000	1000	4.000.000.000	1000	3.500.000.000	1000	3.500.000.000	1000	4.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan
					Meningkatnya Kemandirian Pemuda	Jumlah pemuda yang terfasilitasi pelatihan kepimpinan dan kepelopo	Orang	N/A	500	4.750.000.000	650	5.300.000.000	800	4.800.000.000	950	4.800.000.000	1100	5.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembang	

						ran ****												an Kepemudaan	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi *****						750.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		1.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan	
					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda *****	%	N/A	100	750.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda						4.000.000.000		4.500.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan	

				Pelopor Tingkat Provinsi *****															
					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda *****	Orang	N/A	200	4.000.000.000	200	4.500.000.000	200	4.000.000.000	200	4.000.000.000	200	4.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan
						Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda **	Angka	N/A	47,2	18.200.000.000	47,6	26.450.000.000	47,9	20.000.000.000	48,2	20.150.000.000	48,8	19.689.013.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN ***								18.200.000.000		26.450.000.000		20.000.000.000		20.150.000.000		19.689.013.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	
					Meningkatnya Kapasitas Daya Saing	Persentase pemuda yang mengikut	%	N/A	8,6	16.000.000.000	8,8	19.200.000.000	8,95	17.750.000.000	9,1	17.900.000.000	9,3	17.439.013.000	Dinas Kepemudaan dan Olahra	

					Kepemudaan	i kegiatan organisasi ***												ga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi ****							4.000.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.250.000.000		4.689.013.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	
					Meningkatnya Kemandirian Pemuda	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda ****	%	N/A	13,15	4.000.000.000	12,85	4.500.000.000	12,54	4.500.000.000	12,05	4.250.000.000	11,73	4.689.013.000	Pokja Pemberdayaan Pemuda	
				Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi						1.000.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	

				pemuda *****															
					Terlaksanya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda *****	Orang	N/A	100	1.000.000.000	125	1.250.000.000	125	1.250.000.000	125	1.250.000.000	125	1.250.000.000	Pokja Pemberdayaan Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan
				Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusun						1.500.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.500.000.000		1.939.013.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	

				an dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi *****															
					Terlaksanaanya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi *****	Dokumen	N/A	5	1.500.000.000	5	1.750.000.000	5	1.750.000.000	5	1.500.000.000	5	1.939.013.000	Pokja Pemberdayaan Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan

					Provinsi															
				Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi *****						1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	
					Terlaksanaanya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi *****	Orang	N/A	870	1.500.000.000	1000	1.500.000.000	1000	1.500.000.000	1000	1.500.000.000	1000	1.500.000.000	Pokja Pemberdayaan Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan							12.000.000.000		14.700.000.000		13.250.000.000		13.650.000.000		12.750.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	

			Tingkat Daerah Provinsi ****																
					Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan ****	Orang	N/A	1000	9.500.000.000	1000	11.250.000.000	1000	9.500.000.000	1000	10.400.000.000	1000	9.500.000.000	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	
				Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi *****						9.500.000.000		11.250.000.000		9.500.000.000		10.400.000.000		9.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	
					Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisas	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi	Organisasi	N/A	50	9.500.000.000	55	11.250.000.000	60	9.500.000.000	65	10.400.000.000	70	9.500.000.000	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan

					i kepemudaan tingkat provinsi	kepemudaan tingkat provinsi *****													
					Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah dukumen Kerjasama bidang kepemudaan dengan lembaga terkait ****	Dokumen	N/A	1	2.500.000.000	1	3.450.000.000	1	3.750.000.000	1	3.250.000.000	1	3.250.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda *****						2.500.000.000		3.450.000.000		3.750.000.000		3.250.000.000		3.250.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	

					Terlaksanaanya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda *****	%	N/A	50	2.500.000.000	55	3.450.000.000	60	3.750.000.000	65	3.250.000.000	70	3.250.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan
					Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan ***	%	N/A	80,6	2.200.000.000	80,81	7.250.000.000	81,3	2.250.000.000	81,6	2.250.000.000	81,81	2.250.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe							2.200.000.000		7.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	

			mudaan Kewenangan Provinsi ****																
					Meningkatnya Kemandirian Pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan penyadaran dan karakternya ****	Orang	N/A	3775	2.000.000.000	3775	2.250.000.000	3775	2.250.000.000	3775	2.250.000.000	4325	2.250.000.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi *****						2.000.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	
					Terlaksanya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya *****	Orang	N/A	2500	2.000.000.000	2500	2.250.000.000	2500	2.250.000.000	2500	2.250.000.000	2500	2.250.000.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan

					Meningkatnya Kemandirian Pemuda	Jumlah Sarpras Kepemudaan yang terfasilitasi ****	Unit	N/A	1	200.000.000	1	5.000.000.000	1	0	1	0	1	0	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	
				Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi *****						200.000.000		5.000.000.000		0		0		0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan	
					Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan *****	Unit	N/A	1	200.000.000	1	5.000.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan

Tabel 4.2

Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Outcome / Output	Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktifitas riil	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1.	Pengembangan sport center di setiap kecamatan	1. Sarpras Sport Center/Ruang Terbuka (Bankeu Desa/Kec) 2. Pemassalan Olahraga	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi dan Bankeu Kab./Kota		Bidang Peningkatan Prestasi	Dispermades
2	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	1. Akses Program Kepemudaan untuk pemuda umur 16 s/d 30 tahun 2. Akses Pelatihan dan Sertifikasi 3. Akses Permodalan 4. Akses Pitching Investor	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi wirausaha muda tingkat provinsi		Bidang Pengembangan Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Dinaskertan, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Distanbun, Dinas Parekrafbud
3.	Penguatan dan Pembinaan E-Sport Jawa Tengah	Penyelenggaraan Event E-Sport	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi		Bidang Peningkatan Prestasi dan Bidang Pembudayaan Olahraga	Diskominfo
4.	Mendukung dan menjadikan Kegiatan Tarkam (Pertandingan Antar Kampung) masuk ke dalam Kalender Olahraga Provinsi	1. Penyusunan Kalender Event Pertandingan Antar Kampung 2. Penyelenggaraan Event Pertandingan Antar Kampung sesuai dengan potensi Cabang Olahraga Kabupaten	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi		Bidang Pembudayaan Olahraga	Dispermades
5.	Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Dunia Usaha	Koordinasi dengan perusahaan dalam pembinaan olahraga, seperti sponsor	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang		Bidang Peningkatan Prestasi	Biro Kesra dan Taskin

	dalam pembinaan olahraga, seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program "PERUSAHAAN ASUH"	acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga	pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi			
6.	Peningkatan insentif bagi atlet dan pelatih	1. Pemberian insentif bagi atlet potensial dan Pelatih yang mengikuti PELATDA melalui Hibah kepada KONI 2. Pemberian insentif bagi atlet potensial dan Pelatih yang mengikuti PELATDA melalui Hibah kepada NPCI 3. Pemberian bonus/penghargaan/tali asih bagi atlet dan pelatih berprestasi dalam kejuaraan tingkat nasional	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga sub kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Olahraga Provinsi dan lembaga terkait dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional sub kegiatan pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan atau berjasa dalam mamajukan olahraga		Bidang Peningkatan Prestasi	
7.	Peningkatan kualitas dan tata kelola manajemen olahraga	1. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan 2. Penyelenggaraan dan pengiriman Pekan dan Kejuaraan Olahraga 3. Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 4. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait.	Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga, kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.		Bidang Peningkatan Prestasi	

		5. Pelatihan dan peningkatan mutu SDM Olahraga				
8.	Meningkatkan alokasi anggaran KONI, KORMI, NPCI	1. Pemberian hibah kepada KONI 2. Pemberian hibah kepada KORMI 3. Pemberian hibah kepada NPCI	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga sub kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Olahraga Provinsi dan lembaga terkait		Bidang Peningkatan Prestasi	
9.	Pembangunan GOR internasional di PRPP	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan (FS, Master Plant, DED, PBG dan SLF) 2. Pembangunan GOR internasional di PRPP	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi		Bidang Peningkatan Prestasi	Dis PU dan Binamarga

4.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah

Indikator kinerja sasaran menjadi upaya Dinas Kepemudaan dan Olahraga a Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi. Indikator kinerja tersebut diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dicapai bila sumber daya organisasi dan asumsi – asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator dinas akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang diproyeksikan setiap tahunnya sebagaimana pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja			Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja RPJMD
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
TUJUAN											
1	Indek Pembangunan Olahraga (IPO)	%	0,37	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,50	58,33	58,25	60,25	61,05	61,55	62,15	62,60	62,60
SASARAN											
1	Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	%	N/A	N/A	N/A	25	30	35	37	40	40
2	Tingkat kebugaran masyarakat	%	N/A	0,18	0,202	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
3	Lapangan dan kesempatan kerja pemuda	angka	N/A	55	11,5	45,80	46,10	46,40	46,70	47,10	47,10
4	Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	angka	N/A	50	38,75	47,20	47,60	47,90	48,20	48,80	48,80

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal Kinerja			Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja RPJMD
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi	Indeks	54,50	58,33	58,25	60,25	61,05	61,55	62,15	62,60	62,60
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%	24,98	30,55	23,89	23,07	24,90	31,25	23,25	25,15	25,15

Tabel 4.4
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Satuan	Kondisi Awal Kinerja			Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja RPJMD
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	N/A	79,31	80,41	81,55	82,05	82,55	83,05	83,55	83,55
2	Indeks kepuasan masyarakat Perangkat Daerah	Angka	N/A	3,01	3,02	3,03	3.04	3.05	3,06	3,07	3,07
3	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	N/A	75	76	77	78	79	80	81	81

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menyelaraskan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan Sub Kegiatan sampai dengan periode akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

Keseluruhan Rencana Strategis (Renstra) ini untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga oleh Sekretariat, Bidang- bidang dan Balai PPLOP pada Tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yaitu "Meningkatkan Pembangunan Pemuda, Meningkatkan Pembangunan Olahraga". Dengan kebijakan yang dibuat dapat mengungkit kinerja pembangunan daerah dan adaptif terhadap perubahan kondisi yang ada. Oleh karena itu, seluruh Sekretariat, Bidang-bidang dan Balai PPLOP di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah wajib berpedoman pada Renstra dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Penetapan pagu pendanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan proyeksi yang diberikan oleh TAPD Provinsi Jawa Tengah. Pagu tersebut dimungkinkan mengalami perubahan dikarenakan ketersediaan anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, perlu kiranya penyusunan Renja Tahunan dilakukan dengan cermat agar sasaran pembangunan tetap dapat tercapai pada akhir masa periode Renstra pada tahun 2029.

Kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semarang, September 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680517 198908 1 002

Pohon Kinerja Urusan Olahraga :

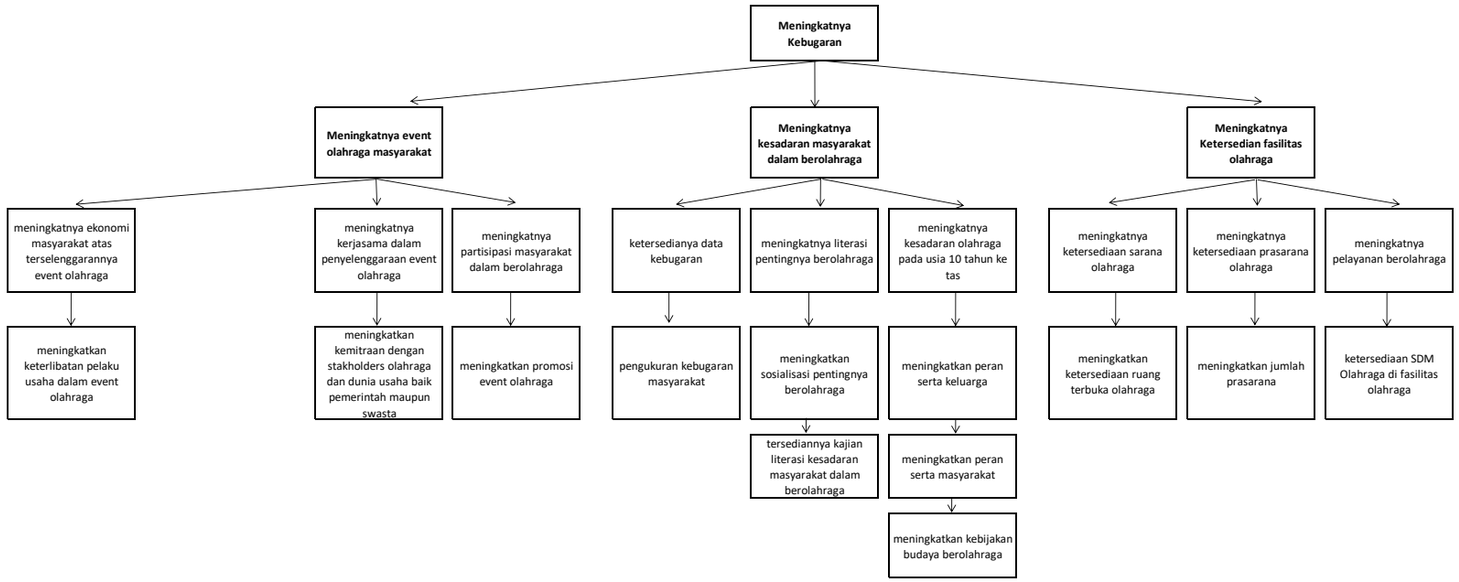

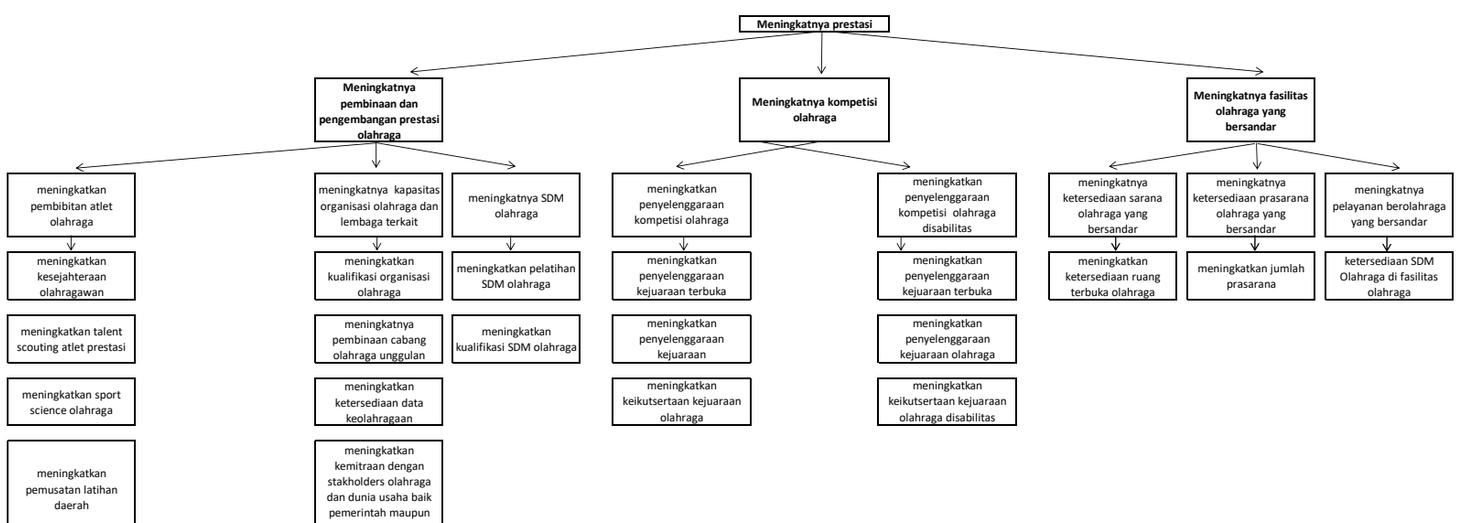

Pohon Kinerja Urusan Pemuda :

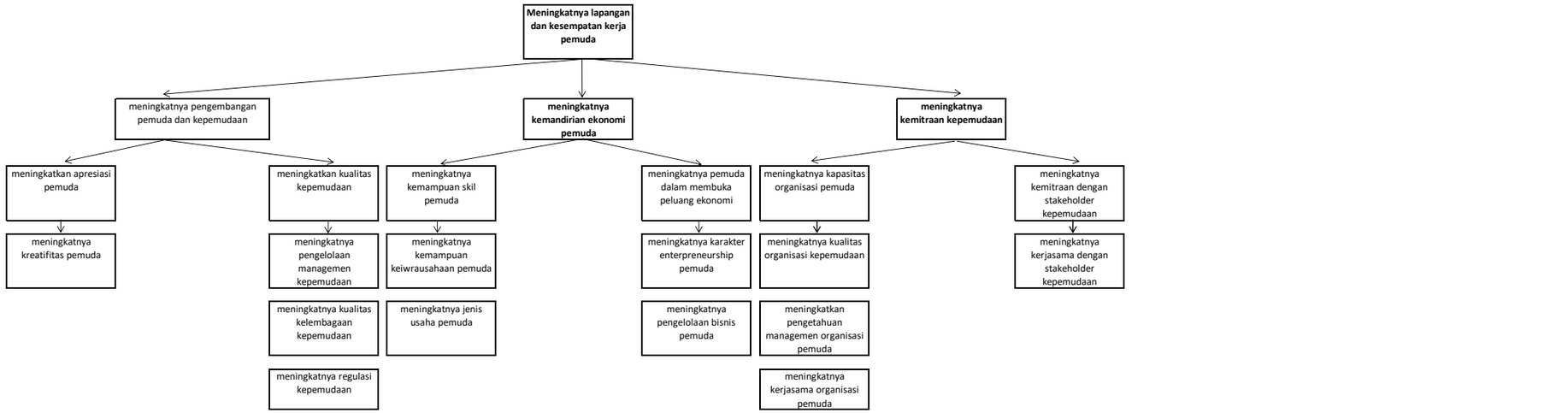

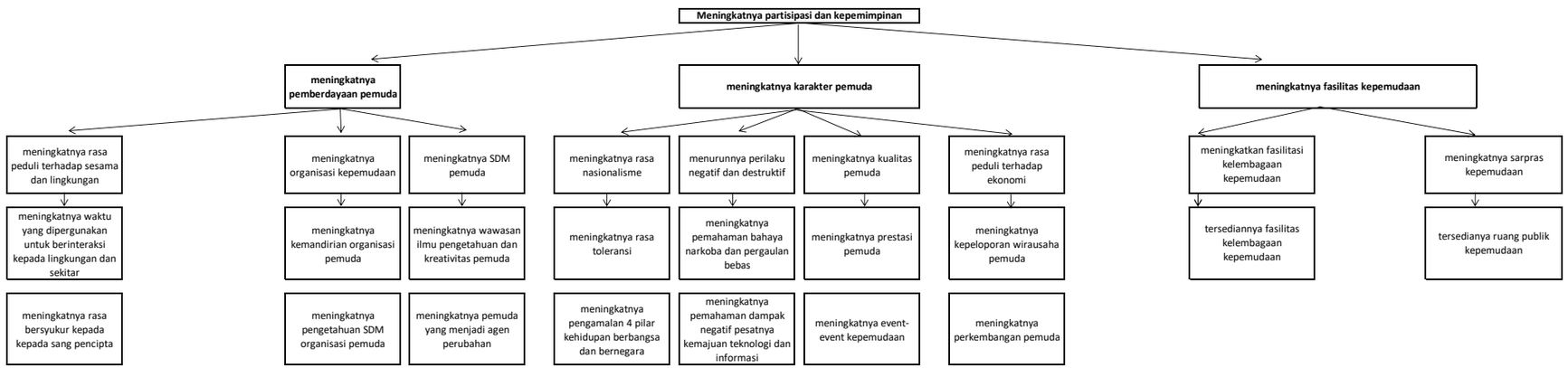

Pohon Kinerja Urusan Pariwisata :

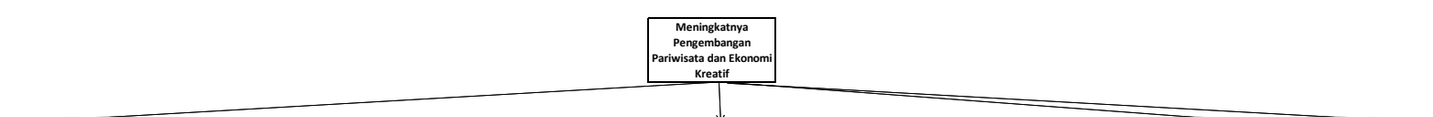

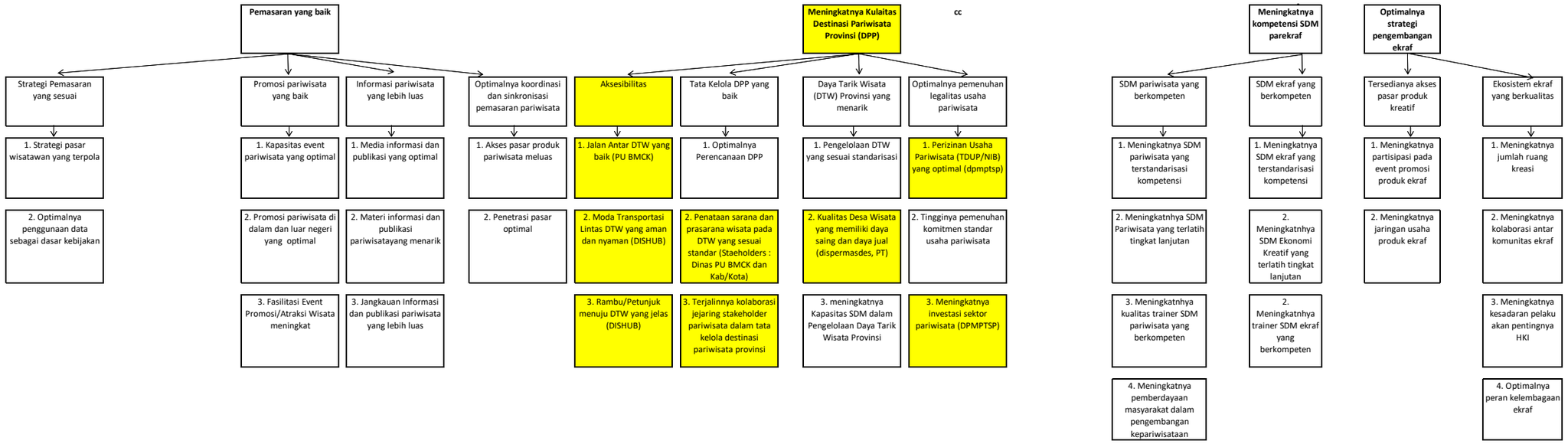
Pemasaran yang baik
Strategi Pemasaran yang sesuai
1. Strategi pasar wisatawan yang terpola
2. Optimalnya penggunaan data sebagai dasar kebijakan
Promosi pariwisata yang baik
1. Kapasitas event pariwisata yang optimal
2. Promosi pariwisata di dalam dan luar negeri yang optimal
3. Fasilitasi Event Promosi/Atraksi Wisata meningkat
Informasi pariwisata yang lebih luas
1. Media informasi dan publikasi yang optimal
2. Materi informasi dan publikasi pariwisatayang menarik
3. Jangkauan Informasi dan publikasi pariwisata yang lebih luas
Optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pemasaran pariwisata
1. Akses pasar produk pariwisata meluas
2. Penetrasi pasar optimal
Meningkatnya Kulaitas Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP)
Aksesibilitas
1. Jalan Antar DTW yang baik (PU BMCK)
2. Moda Transportasi Lintas DTW yang aman dan nyaman (DISHUB)
3. Rambu/Petunjuk menuju DTW yang jelas (DISHUB)
Tata Kelola DPP yang baik
1. Optimalnya Perencanaan DPP
2. Penataan sarana dan prasarana wisata pada DTW yang sesuai standar (Staeholders : Dinas PU BMCK dan Kab/Kota)
3. Terjalinnya kolaborasi jejaring stakeholder pariwisata dalam tata kelola destinasi pariwisata provinsi
Daya Tarik Wisata (DTW) Provinsi yang menarik
1. Pengelolaan DTW yang sesuai standarisasi
2. Kualitas Desa Wisata yang memiliki daya saing dan daya jual (dispermasdes, PT)
3. meningkatnya Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
Optimalnya pemenuhan legalitas usaha pariwisata
1. Perizinan Usaha Pariwisata (TDUP/NIB) yang optimal (dpmptsp)
2. Tingginya pemenuhan komitmen standar usaha pariwisata
3. Meningkatnya investasi sektor pariwisata (DPMPTSP)
cc
Meningkatnya kompetensi SDM parekraf
SDM pariwisata yang berkompeten
1. Meningkatnya SDM pariwisata yang terstandarisasi kompetensi
2. Meningkatnhya SDM Pariwisata yang terlatih tingkat lanjutan
3. Meningkatnhya kualitas trainer SDM pariwisata yang berkompeten
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan
SDM ekraf yang berkompeten
1. Meningkatnya SDM ekraf yang terstandarisasi kompetensi
2. Meningkatnhya SDM Ekonomi Kreatif yang terlatih tingkat lanjutan
2. Meningkatnhya trainer SDM ekraf yang berkompeten
Optimalnya strategi pengembangan ekraf
Tersedianya akses pasar produk kreatif
1. Meningkatnya partisipasi pada event promosi produk ekraf
2. Meningkatnya jaringan usaha produk ekraf
Ekosistem ekraf yang berkualitas
1. Meningkatnya jumlah ruang kreasi
2. Meningkatnya kolaborasi antar komunitas ekraf
3. Meningkatnya kesadaran pelaku akan pentingnya HKI
4. Optimalnya peran kelembagaan ekraf

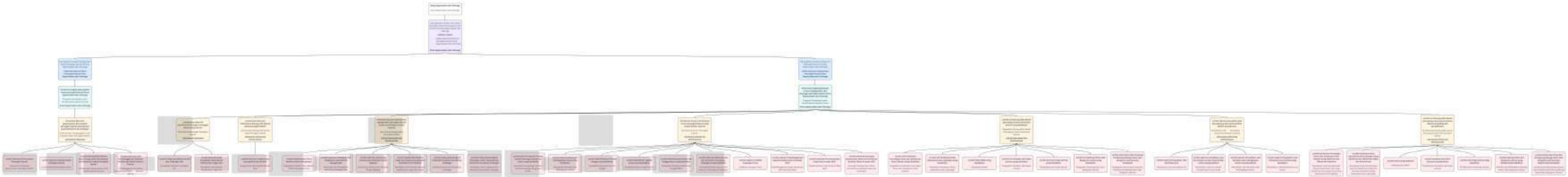

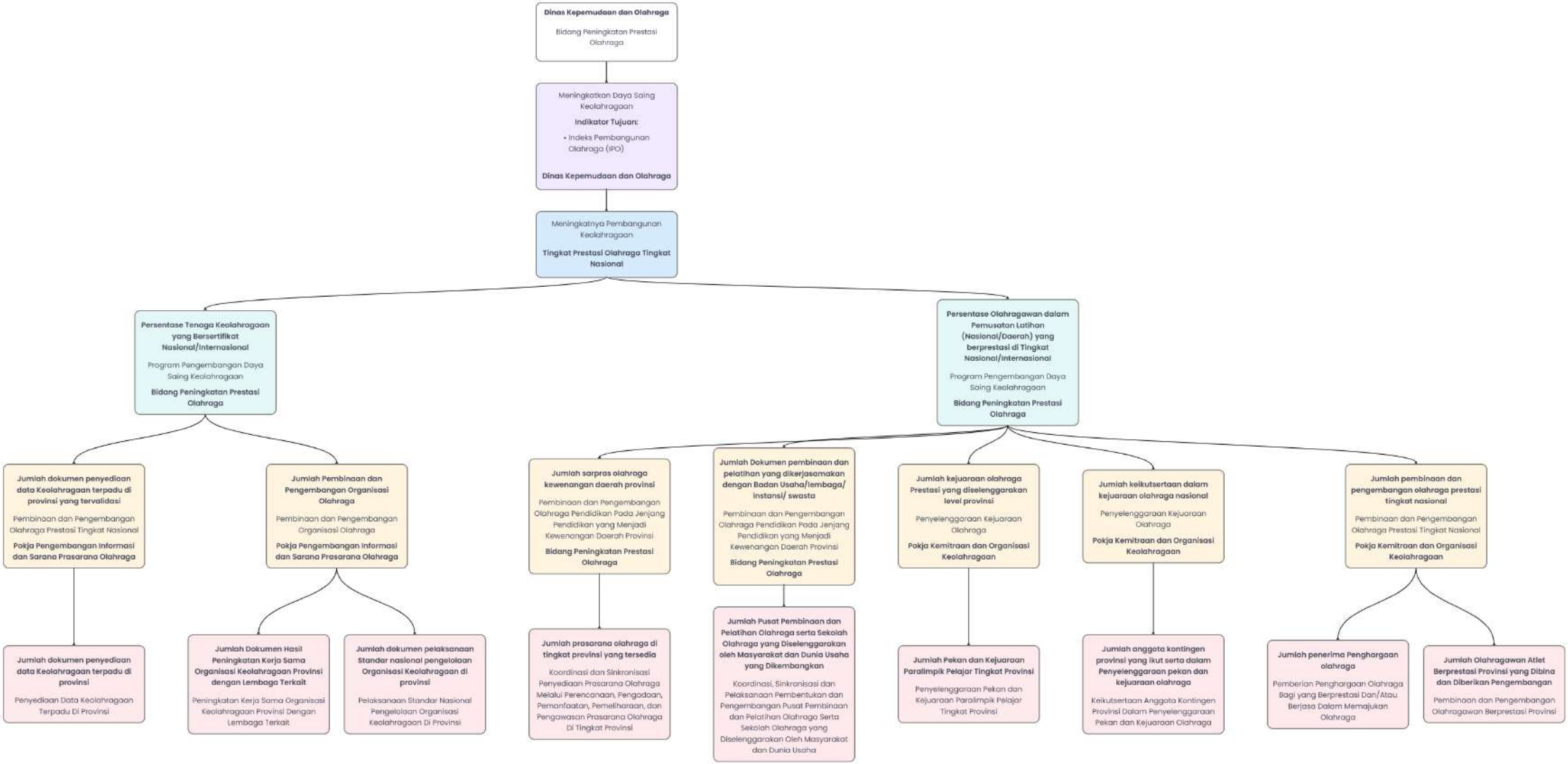
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Meningkatkan Daya Saing Keolahragaan
Indikator Tujuan:
• Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Pembangunan Keolahragaan
Tingkat Prestasi Olahraga Tingkat Nasional
Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/internasional
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi yang tervalidasi
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
Pokja Pengembangan Informasi dan Sarana Prasarana Olahraga
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Pokja Pengembangan Informasi dan Sarana Prasarana Olahraga
Jumlah sarpras olahraga kewenangan daerah provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Jumlah Dokumen pembinaan dan pelatihan yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha/lembaga/ instansi/ swasta
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Jumlah kejuaraan olahraga Prestasi yang diselenggarakan level provinsi
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan
Jumlah keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga nasional
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan
Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan
Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
Penyediaan Data Keolahragaan Terpadu Di Provinsi
Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait
Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi
Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Di Provinsi
Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga Di Tingkat Provinsi
Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
Keikutsertaan Anggota Kontingen Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
Jumlah penerima Penghargaan olahraga
Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi yang Berprestasi Dan/Atau Berjasa Dalam Memajukan Olahraga
Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi

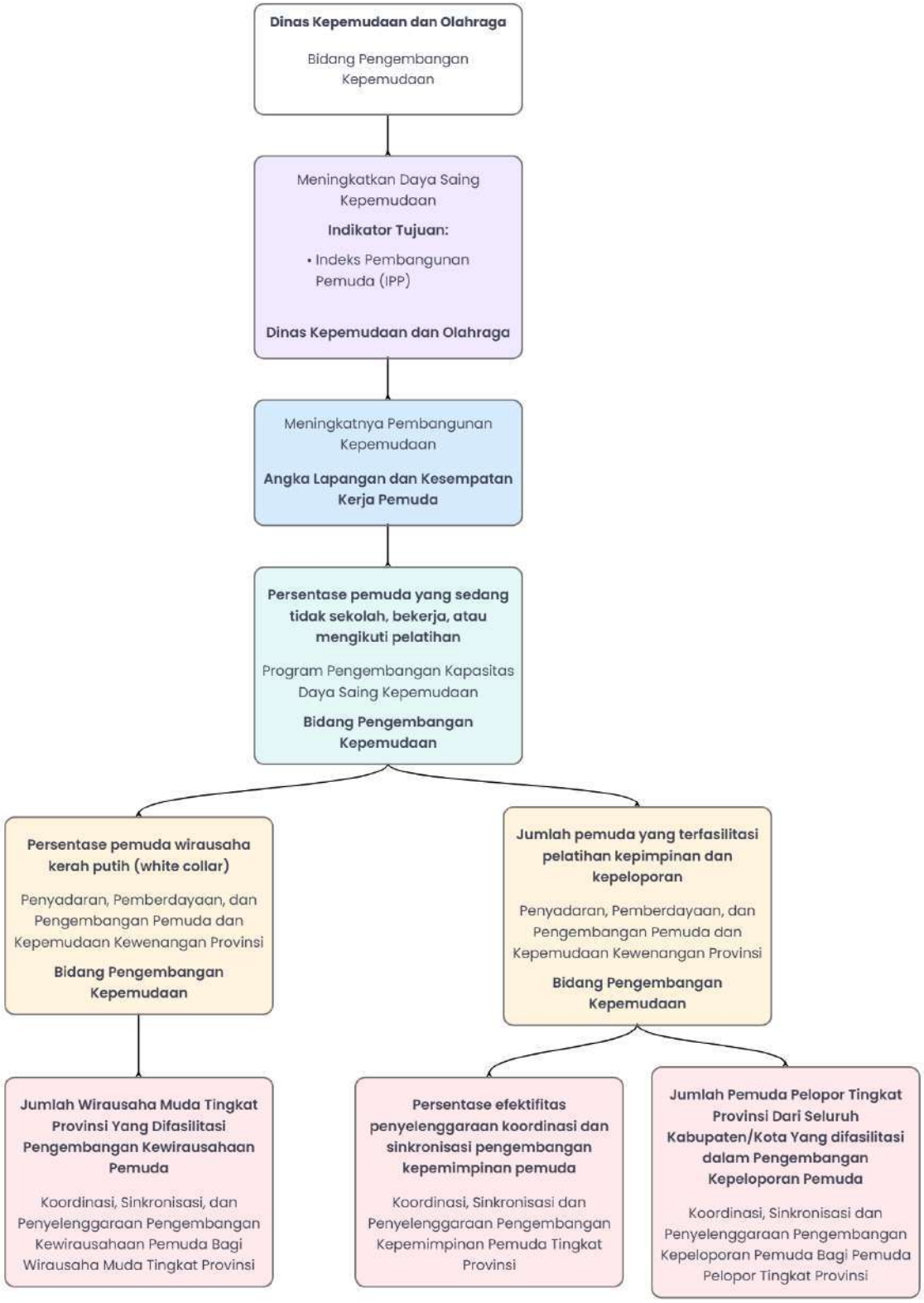
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Bidang Pengembangan Kepemudaan
Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan
Indikator Tujuan:
• Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan
Angka Lapangan dan Kesempatan Kerja Pemuda
Persentase pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Bidang Pengembangan Kepemudaan
Persentase pemuda wirausaha kerah putih (white collar)
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Bidang Pengembangan Kepemudaan
Jumlah pemuda yang terfasilitasi pelatihan kepimpinan dan kepeloporan
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Bidang Pengembangan Kepemudaan
Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Provinsi
Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi

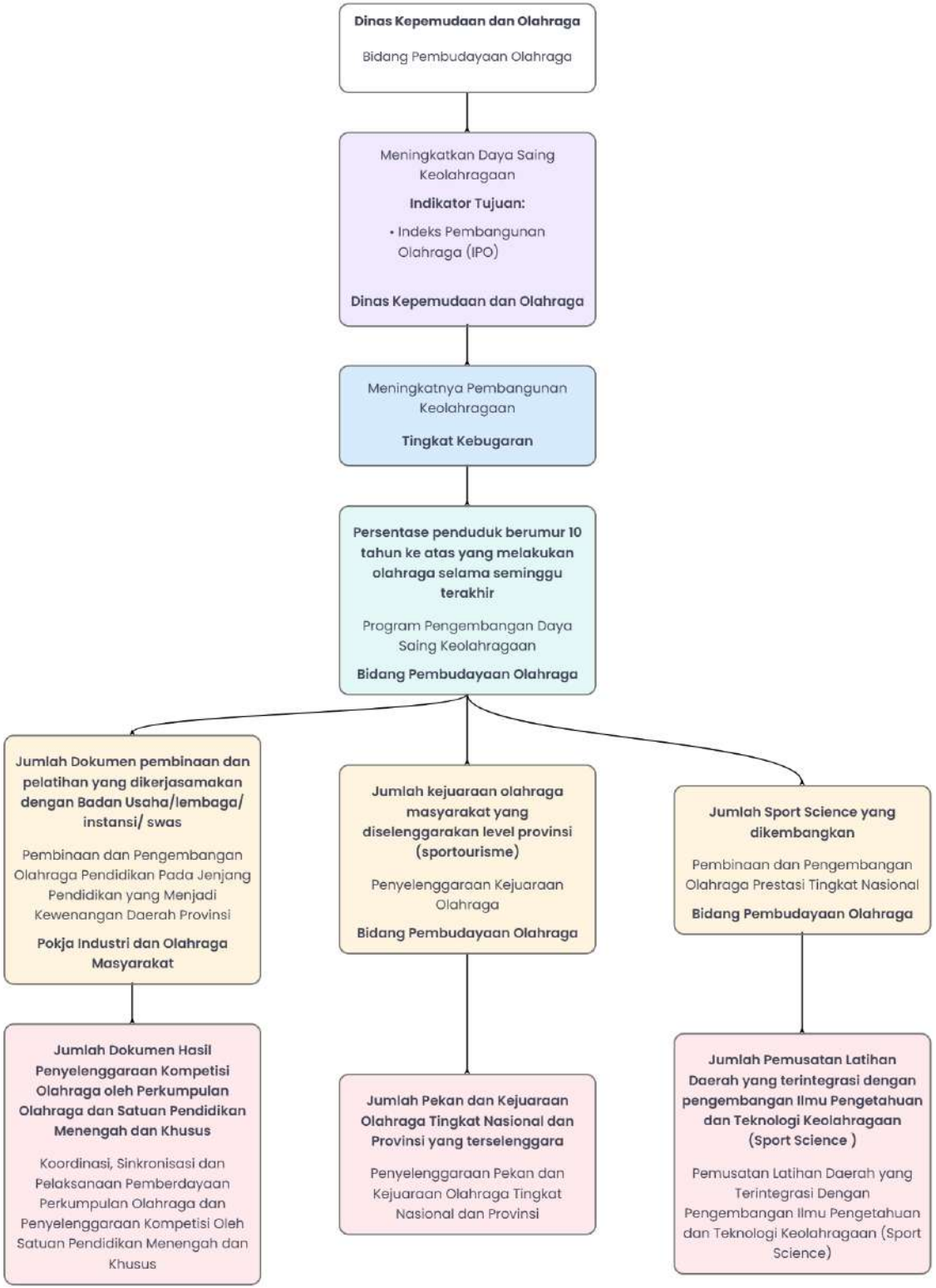
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Bidang Pembudayaan Olahraga
Meningkatkan Daya Saing Keolahragaan
Indikator Tujuan:
• Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Pembangunan Keolahragaan
Tingkat Kebugaran
Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
Bidang Pembudayaan Olahraga
Jumlah Dokumen pembinaan dan pelatihan yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha/lembaga/ instansi/ swas
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Pokja Industri dan Olahraga Masyarakat
Jumlah kejuaraan olahraga masyarakat yang diselenggarakan level provinsi (sportourisme)
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
Bidang Pembudayaan Olahraga
Jumlah Sport Science yang dikembangkan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
Bidang Pembudayaan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi Dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

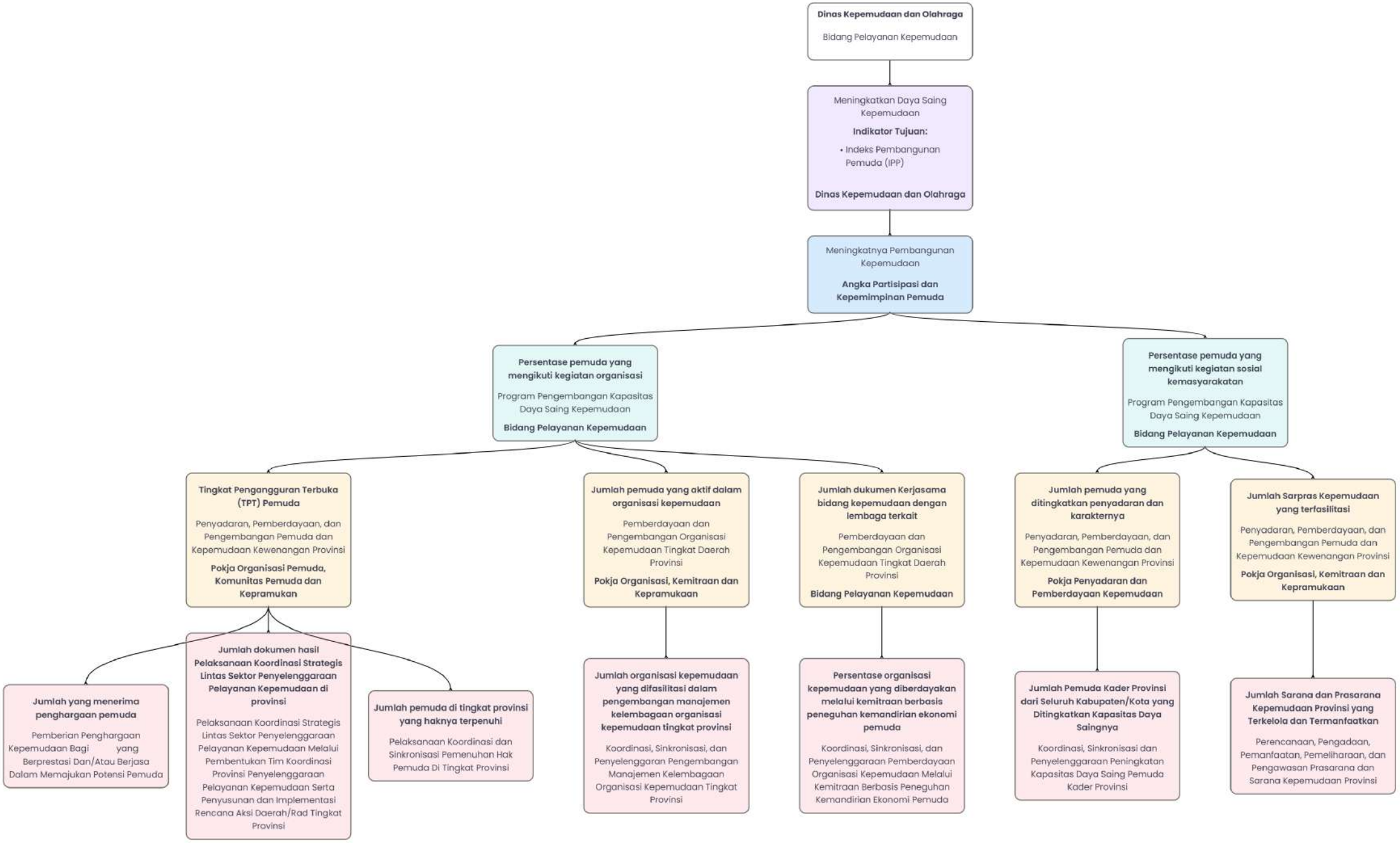
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Bidang Pelayanan Kepemudaan
Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan
Indikator Tujuan:
• Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan
Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda
Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Bidang Pelayanan Kepemudaan
Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Bidang Pelayanan Kepemudaan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Pokja Organisasi Pemuda, Komunitas Pemuda dan Kepramukan
Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan
Jumlah dukumen Kerjasama bidang kepemudaan dengan lembaga terkait
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
Bidang Pelayanan Kepemudaan
Jumlah pemuda yang ditingkatkan penyadaran dan karakternya
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan
Jumlah Sarpras Kepemudaan yang terfasilitasi
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan
Jumlah yang menerima penghargaan pemuda
Pemberian Penghargaan Kepemudaan Bagi yang Berprestasi Dan/Atau Berjasa Dalam Memajukan Potensi Pemuda
Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Provinsi
Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda Di Tingkat Provinsi
Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaran Pengembangan Manajemen Kelembagaan Organisasi Kepemudaan Tingkat Provinsi
Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda
Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi

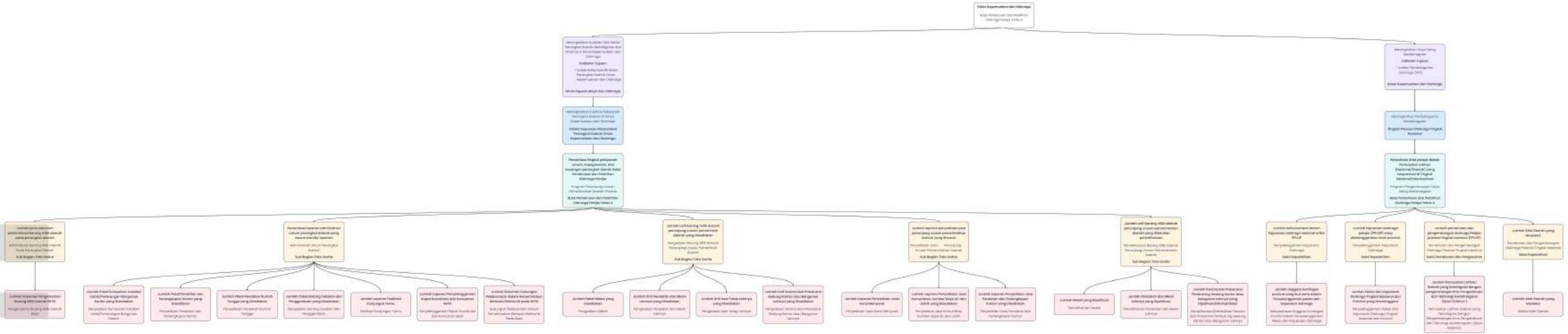
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Berlandaskan Akar Rumput dan Inovasi Sosial
Indikator Tujuan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sasaran Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan fungsi penyerapan aspirasi, pengaduan, dan keuangan pemerintah daerah dalam pelayanan dan pelaporan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Prasarana
Aktif Pendidikan dan Pelatihan Catatan Sipil Kelas 2
Jumlah perda kabupaten/kota yang telah ditindaklanjuti oleh kepala daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Bagian Tata Usaha
Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang Ditetapkan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemanfaatan ruang publik untuk aktivitas ekonomi yang sesuai (misalnya: taman, alun-alun, atau fasilitas umum lainnya)
Administrasi UPPLAN Perangkat Daerah
Sub Bagian Tata Usaha
Jumlah Pokok Kebijakan dan Peraturan yang Ditetapkan
Penyusunan Peraturan dan Kebijakan Daerah
Jumlah Pokok Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang Diselenggarakan
Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Jumlah Pokok Pendidikan Khusus Tenaga yang Diselenggarakan
Pengelolaan Pendidikan Khusus Tenaga
Jumlah Pokok Bahan Ajar dan Penggunaannya yang Diselenggarakan
Pengelolaan Bahan Ajar dan Penggunaannya
Jumlah Laporan Pelatihan yang Diselenggarakan
Pelatihan Kompetensi Teknis
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Digital Kependidikan dan Konsultasi SDM
Penyelenggaraan Digital Kependidikan dan Konsultasi SDM
Jumlah Kerjasama Kelembagaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pemberdayaan, Statistik Rahasia Pendidikan, Berbasis Elektronik pada 2070
Sub Bagian Pelaporan dan Statistik Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pada Rapat
Jumlah Unit Barang milik daerah pemanfaatan sewa pemanfaatan oleh pihak yang disetujui
Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Bagian Tata Usaha
Jumlah Pelaku Usaha yang Terdaftar
Pengelolaan Data
Jumlah Unit Usaha yang Aktif (Aktif) yang Diselenggarakan
Pengelolaan Kegiatan dan Aktif (Aktif)
Jumlah Unit Usaha Tetap usaha yang Diselenggarakan
Pengelolaan Usaha Tetap usaha yang
Jumlah Unit Usaha dan Prasarana Mata yang Mana atau Mengurus Lainnya
Mengelola Usaha dan Prasarana Mata yang Mana atau Mengurus Lainnya
Jumlah aparatur dan aktivitas yang pemanfaatan yang efektif
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Bagian Tata Usaha
Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Kandidat yang di
Penyelidikan Jasa Kandidat yang di
Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Kemampuan, Kumpul Saya di dan Lainnya yang Diselidiki
Penyelidikan Jasa Kumpulan Saya di dan Lainnya yang Diselidiki
Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pemberian dan Pertanggungan Kasus yang Diselidiki
Penyelidikan Jasa Pemberian dan Pertanggungan Kasus yang Diselidiki
Jumlah aset barang milik daerah pemanfaatan yang efektif dan efisien pemerintahan
Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Bagian Tata Usaha
Jumlah Aset yang Dikelola
Pemanfaatan Aset yang Dikelola
Jumlah Inventaris dan Aset yang Dipelihara/Diinventarisasi
Pemeliharaan/Inventarisasi Barang Milik Daerah yang Dipelihara/Diinventarisasi
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan
Indikator Tujuan
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Program Pengembangan Data Sektor Kesehatan
Aktif Pendidikan dan Pelatihan Catatan Sipil Kelas 3
Jumlah kabupaten/kota dalam fasilitasi pelayanan kesehatan ibu dan anak
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Sub Bagian Tata Usaha
Jumlah kab/kota yang melaporkan [PPLSP]
Pengelolaan Laporan Kejadian Luar Biasa
Jumlah kab/kota yang melaporkan [PPLSP] yang ditanggapi dalam waktu 24 jam
Pengelolaan Laporan Kejadian Luar Biasa
Jumlah penduduk yang terdaftar dan pengembangan aplikasi [SPLDP]
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah Aset Daerah yang Teridentifikasi
Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Aset Daerah yang Teridentifikasi

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Disporapar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda	Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda	Hasil pelatihan kewirausahaan tidak ditindaklanjuti oleh peserta	12	Keterbatasan modal	Tingkat keberhasilan kewirausahaan rendah	Melakukan upaya kemitraan dengan stakeholder yang dapat mendukung kegiatan kewirausahaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	Persentase partisipasi dan kepemimpinan	Rendahnya kesadaran pemuda untuk partisipasi	9	Kurangnya sosialisasi, pendampingan	Kepesertaan pemuda dalam organisasi rendah	Melakukan tindakan penyadaran	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	Peringkat nasional	Perpindahan/mutasi atlet	12	Jaminan kesejahteraan hidup atlet yang masih rendah	Peringkat nasional kejuaraan multievent menurun	Memberikan insentif kepada atlet	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat	Persentase Tingkat kebugaran masyarakat	Budaya berolahraga masyarakat yang masih rendah	9	Sosialisasi pembudayaan dan pemassalan olahraga kepada masyarakat masih kurang	Tingkat kebugaran masyarakat kurang maksimal, banyak masyarakat yang tidak sehat dan rentan sakit	Membudayakan olahraga masyarakat	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Nilai tambah	Masih rendahnya insentif, perlindungan produk, anggaran pengembangan	9	1. Rendahnya minat para investor dalam	Belum optimalnya capaian target Kontribusi PDRB dan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi	Melakukan pemasaran terkait potensi daya tarik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	ekonomi Kreatif	parekraf, pembinaan, minimnya fasilitas parekraf, pemasaran parekraf, hingga belum optimalnya pasar domestik dan internasional yang mendukung pertumbuhan industri Parekraf di Provinsi Jawa Tengah		maupun luar negeri untuk berinvestasi pada sektor parekraf di Provinsi Jawa Tengah 2. Rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah 3. Strategi pemulihan Industri Parekraf belum dilakukan secara optimal	Kreatif	Wisata Jawa Tengah untuk meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan serta peningkatan mutu produk dan SDM Parekraf di Provinsi jawa tengah	Provinsi Jawa Tengah	
Sasaran 1: Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan	Pengeluaran Wisatawan	Menurunnya intensitas perjalanan wisatawan dan perubahan kebijakan dari pariwisata massal menjadi pariwisata yang berkualitas	9	1. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 2. Kurangnya dukungan kepada para pelaku parekraf dalam beradaptasi melalui teknologi digital, strategi	1. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 2. Kurangnya dukungan kepada pelaku parekraf melalui teknologi digital, strategi pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata berkelanjutan	Melakukan sosialisasi kepada pelaku parekraf	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
				pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata berkelanjutan				
Sasaran 2: Meningkatnya Jumlah Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang ditetapkan	Penetapan Kab/Kota (KaTa) Kreatif	Kurangnya pemahaman tentang Kab/Kota (KaTa) Kreatif	9	1. Kurangnya dukungan kolaborasi antar elemen ekraf di kab/kota 2. Kurang Optimalnya kreativitas dan inovasi-inovasi baru serta kolaborasi dengan jejaring pentahelix di Kab/Kota 3.Kurangnya regulasi terkait kebijakan tentang Ekraf	Kurangnya minat Kab/Kota (KaTa) mengikuti PMK3I	Optimalisasi kemitraan dengan stakeholder parekraf	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Kawasan Pariwisata pada setiap Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Pariwisata yang dikembangkan	pengembangan kawasan pariwisata tidak disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung lainnya	9	perencanaan lintas sektoral pada Pengembangan Kawasan Pariwisata dari segi aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ancillary kurang terkoordinasi	Hasil pengembangan kawasan pariwisata belum optimal dimanfaatkan	Optimalisasi pengembangan Kawasan Pariwisata dari segi aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ancillary	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Sasaran : Meningkatnya Kab/Kota yang dipetakan dan diidentifikasi potensinya untuk menetapkan subsektor ekraf yang bisa menjadi unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PMK3I)	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang teruji petik	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang teruji petik tidak sesuai target waktu yang ditentukan	6	Kurangnya Pemahaman pelaku ekraf tentang Kabupaten/Kota kreatif (KaTa kreatif) dan minimnya pembiayaan	Proses Uji petik Kab/Kota (KaTa) Kreatif menjadi lebih lama	Optimalisasi pemahaman KaTa kreatif dan penyediaan anggaran	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Sasaran : Meningkatnya SDM Parekraf yang tersertifikasi	Jumlah SDM Parekraf yang Tersertifikasi	Kurangnya fasilitasi sertifikasi uji kompetensi SDM Parekraf	9	Rendahnya dukungan dan penguatan sektor parekraf	Kurangnya SDM Parekraf yang kompeten	Penguatan fasilitasi sertifikasi uji kompetensi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sedangkan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta Masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan Pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan daerah itu juga harus mendukung pencapaian target Pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik masing – masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional. Berdasarkan konsep Pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk memeratakan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan

daya saing daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah tersebut telah membagi urusan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah menjadi 3 (Tiga) urusan dan 1 (Satu) fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebanyak 6 (Enam) urusan yang terdiri dari Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebanyak 18 (Delapan belas) urusan yang terdiri dari Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
3. Urusan Pilihan sebanyak 8 (Delapan) urusan yang terdiri dari Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebanyak 5 (Lima) fungsi yang terdiri dari Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; dan Fungsi Penunjang Lainnya.

Ketiga urusan dan fungsi penunjang yang ada di Provinsi Jawa Tengah tersebut telah diampu oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang salah satunya adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor …. Tahun 2025 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi …….

Tujuan Pemajuan Kebudayaan menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 adalah menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Karena mencakup segenap sistem kehidupan sosial di Indonesia, kebudayaan sepantasnya ditempatkan sebagai garda terdepan dalam kehidupan berbangsa. Kebudayaan semestinya tidak dipandang sebagai salah satu sektor pembangunan, tapi justru sebagai pondasi pembangunan yang mendorong pembangunan dengan cara membentuk mentalitas dan wawasan masyarakat yang diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kebudayaan juga memberdayakan pembangunan, karena menghadirkan sikap dan perspektif yang mengutamakan keselarasan antara manusia dan lingkungannya. Sikap dan perspektif berlandaskan kesadaran budaya akan menjaga pembangunan, sehingga tidak menguras habis kekayaan alam ataupun meminggirkan kaum lemah demi akumulasi ekonomi bagi segelitir orang.

Pemajuan kebudayaan nasional berdampak terhadap banyak sektor kehidupan. berpengaruh terhadap kepribadian, ketahanan, kerukunan, dan kesejahteraan bangsa. Oleh karenanya, proses perumusan undang-undang menyepakati sepuluh prinsip sebagai panduan yaitu Asas Toleransi Adalah bahwa pemajuan kebudayaan dilandasi dengan asas saling menghargai dan menghormati ; Asas Keberagaman adalah bahwa pemajuan kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan ; Asas Kelokalan adalah bahwa pemajuan kebudayaan memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan local ; Asas Lintas Wilayah adalah bahwa pemajuan kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administrasi ; Asas Partisipatif adalah pemajuan kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung ; Asas Manfaat adalah pemajuan kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat ; Asas Keberlanjutan adalah pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan dating ; Asas Kebebasan Berekspresi adalah upaya pemajuan kebudayaan

menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; Asas Keterpaduan adalah pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan ; Asas Kesederajatan adalah bahwa pemajua kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beragam serta Asas Gotong Royong adalah pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Kepariwisataan menurut Undang - Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha sedangkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kegiatan kepariwisataan tersebut mempunyai tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab; mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional.

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global; menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara; menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global; menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal; mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif; melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; serta mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan

melalui pengembangan riset; pengembangan pendidikan; fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; penyediaan infrastruktur; pengembangan sistem pemasaran; pemberian insentif; fasilitasi kekayaan intelektual; serta pelindungan hasil kreativitas.

Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan ekonomi kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan ekonomi kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.

Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah merupakan penjabaran dokumen Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebiajkan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah **“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”.** Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan pada 6 (enam) misi, yaitu: 1) Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global; 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sector unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsive dan kolaboratif dengan

mengedepankan nilai nilai integritas; 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencnaan tata ruang yang responsif; 5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; dan 6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. Renstra juga disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2025-2029 telah menetapkan Tujuan Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah "Jawa Tengah Yang Maju Dan Berkelanjutan". Dengan sasaran : yang akan diwujudkan sebagai berikut : 1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis; 2) Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan, serta 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter

Penyusunan dokumen Renstra juga tidak terlepas dari sinergitas antar dokumen perencanaan daerah baik secara vertikal dengan perencanaan tingkat pusat atau Kementerian/Lembaga maupun secara horizontal dengan perencanaan antara Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah mengacu dan melakukan penelaahan pada perencanaan tingkat pusat Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penelaahan dokumen perencanaan juga dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dan rumusan strategi kebijakan pengembangan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kedepan saling mendukung satu dengan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029; (belum ditetapkan) ;
17. Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif tentang rencana Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029 (belum ditetapkan) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran

Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 156);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah ;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah ;
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah ;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan pedoman bagi Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah dalam menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 di Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan digunakan sebagai pedoman untuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2025-2029

Adapun tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah untuk :

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama kurun waktu 2025-2029;

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi berbatasan, dan Pemerintah Pusat;
3. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah kurun waktu Tahun 2025-2029;
4. Sebagai pedoman penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan.
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan ;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis ini berdasarkan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2025 serta berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 0007/0001565 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dengan uraian RENSTRA Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan Perangkat Daerah

b. Sasaran Perangkat Daerah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

4.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara singkat, harapan dan mimpi tentang hasil pembangunan bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lima tahun mendatang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Hal ini ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ..... Tahun ..... tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah (TBJT, Museum, UPTD Pariwisata)

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang pelindungan kebudayaan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, bidang ekonomi kreatif.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pelindungan kebudayaan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, bidang ekonomi kreatif
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelindungan kebudayaan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, bidang ekonomi kreatif
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pelindungan Kebudayaan, Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif, dan UPT Dinas. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Adapun tugas fungsi Sekretariat, Bidang, dan UPT adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
   A. Tugas

      Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

   B. Fungsi

      Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

      - perumusan kebijakan bidang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan , pengembangan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
      - pelaksanaan kebijakan bidang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
      - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
      - pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat
   A. Tugas

      Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

   B. Fungsi

      Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

      - Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
      - Penyampaian bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan dinas;
      - Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

        yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan

masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- Penyiapan bahan koordinasi pelaksanan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- Penyiapan bahan pengelolaan barang milik daerah / kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan tugasnya;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dengan fungsinya.

2.1 Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
- Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data informasi di Bidang Program;
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Keuangan meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di Lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian, meliputi :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pelindungan Kebudayaan

A. Tugas

Bidang Pelindungan Kebudayaan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan kebudayaan.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelindungan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan terkait pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, dan sejarah lokal;
b. Pelaksanaan kebijakan terkait pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, dan sejarah lokal;
c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, dan sejarah lokal;
d. Monitoring dan evaluasi terkait pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, dan sejarah lokal;
e. Pelaporan dan rekomendasi terkait pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, dan sejarah lokal; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Pokja Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pokja Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Lembaga Adat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan, meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

di Bidang Penginventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan, Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan, Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan, Pengkajian Sejarah Objek Pemajuan Kebudayaan;

- menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Penginventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan, Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan, Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan, Pengkajian Sejarah Objek Pemajuan Kebudayaan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Bidang Penginventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan, Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan, Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan, Pengkajian Sejarah Objek Pemajuan Kebudayaan;
- menyiapkan bahan Bidang Penginventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan, Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan, Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan, Pengkajian Sejarah Objek Pemajuan Kebudayaan;
- menyiapkan bahan pengelolaan Bidang Penginventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan, Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan, Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan, Pengkajian Sejarah Objek Pemajuan Kebudayaan;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Bidang Penginventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan, Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan, Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan, Pengkajian Sejarah Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Pokja Pelindungan Cagar Budaya dan Permuseuman

Pokja Pelindungan Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelindungan Cagar Budaya dan Permuseuman, meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyelamatan Cagar Budaya, Pengamanan Cagar Budaya, Zonasi Situs dan Kawasan Cagar Budaya, Pemeliharaan Cagar Budaya, Pemugaran Cagar Budaya, Peneetapan Cagar Budaya, Pemeringkatan Cagar Budaya, Pengkajian Sejarah Cagar Budaya, Penguatan Literasi Sejarah Lokal;
- menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyelamatan Cagar Budaya, Pengamanan Cagar Budaya, Zonasi Situs dan Kawasan Cagar Budaya, Pemeliharaan Cagar Budaya, Pemugaran Cagar Budaya, Peneetapan Cagar Budaya, Pemeringkatan Cagar Budaya, Pengkajian Sejarah Cagar Budaya, Penguatan Literasi Sejarah Lokal;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Bidang Penyelamatan Cagar Budaya, Pengamanan Cagar Budaya, Zonasi Situs dan Kawasan Cagar Budaya, Pemeliharaan Cagar Budaya, Pemugaran Cagar Budaya, Penetapan Cagar Budaya, Pemeringkatan Cagar Budaya, Pengkajian Sejarah Cagar Budaya, Penguatan Literasi Sejarah Lokal;
- menyiapkan bahan Bidang Penyelamatan Cagar Budaya, Pengamanan Cagar Budaya, Zonasi Situs dan Kawasan Cagar Budaya, Pemeliharaan Cagar Budaya, Pemugaran Cagar Budaya, Peneetapan Cagar Budaya, Pemeringkatan Cagar Budaya, Pengkajian Sejarah Cagar Budaya, Penguatan Literasi Sejarah Lokal;
- menyiapkan bahan pengelolaan Bidang Penyelamatan Cagar Budaya, Pengamanan Cagar Budaya, Zonasi Situs dan Kawasan Cagar Budaya, Pemeliharaan Cagar Budaya, Pemugaran Cagar Budaya, Peneetapan Cagar Budaya, Pemeringkatan Cagar Budaya, Pengkajian Sejarah Cagar Budaya, Penguatan Literasi Sejarah Lokal;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Bidang Penyelamatan Cagar Budaya, Pengamanan Cagar Budaya, Zonasi Situs dan

Kawasan Cagar Budaya, Pemeliharaan Cagar Budaya, Pemugaran Cagar Budaya, Peneetapan Cagar Budaya, Pemeringkatan Cagar Budaya, Pengkajian Sejarah Cagar Budaya, Penguatan Literasi Sejarah Lokal; dan

- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan

A. Tugas

Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan terkait pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, pembinaan Sumber Daya Manusia, dan tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan;
b. Pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, pembinaan Sumber Daya Manusia, dan tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan Objek pemajuan pebudayaan dan Cagar Budaya, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, pembinaan Sumber Daya Manusia, dan tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan;
d. Monitoring dan evaluasi terkait pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, pembinaan Sumber Daya Manusia, dan tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan;
e. Pelaporan dan rekomendasi terkait pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, pembinaan Sumber Daya Manusia, dan tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Pokja Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya

Pokja Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya OPK dan CB, meliputi:

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Internalisasi, Difusi, Inovasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Pengkajian atau Penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Revitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Adaptasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya;
- menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Internalisasi, Difusi, Inovasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Pengkajian atau Penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Revitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Adaptasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Bidang Internalisasi, Difusi, Inovasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Pengkajian atau Penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Revitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Adaptasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya;
- menyiapkan bahan Bidang Internalisasi, Difusi, Inovasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Pengkajian atau Penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Revitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Adaptasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya;
- menyiapkan bahan pengelolaan Bidang Internalisasi, Difusi, Inovasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Pengkajian atau Penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Revitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Adaptasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Bidang Internalisasi, Difusi, Inovasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Pengkajian atau Penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Revitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Adaptasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Pokja Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan

Pokja Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan, meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Komunikasi lintas budaya dan kolaborasi antarbudaya, peningkatan Kerjasama nasional dan internasional di bidang kebudayaan;
- menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Promosi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Komunikasi lintasbudaya dan kolaborasi antarbudaya, peningkatan Kerjasama nasional dan internasional di bidang kebudayaan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Bidang Promosi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Komunikasi lintasbudaya dan kolaborasi antarbudaya, peningkatan Kerjasama nasional dan internasional di bidang kebudayaan;
- menyiapkan bahan Bidang Promosi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Komunikasi lintasbudaya dan kolaborasi antarbudaya, peningkatan Kerjasama nasional dan internasional di bidang kebudayaan;
- menyiapkan bahan pengelolaan Bidang Promosi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Komunikasi lintasbudaya dan kolaborasi antarbudaya, peningkatan Kerjasama nasional dan internasional di bidang kebudayaan;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Bidang Promosi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Komunikasi lintasbudaya dan kolaborasi antarbudaya, peningkatan Kerjasama nasional dan internasional di bidang kebudayaan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3 Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan

Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata

Kebudayaan, meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Peningkaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Peningkaatan kapasitas tata Kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan, Apresiasi Insan Kebudayaan;
- menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Peningkaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Peningkaatan kapasitas tata Kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan, Apresiasi Insan Kebudayaan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Bidang Peningkaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Peningkaatan kapasitas tata Kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan, Apresiasi Insan Kebudayaan;
- menyiapkan bahan Bidang Peningkaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Peningkaatan kapasitas tata Kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan, Apresiasi Insan Kebudayaan;
- menyiapkan bahan pengelolaan Bidang Peningkaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Peningkaatan kapasitas tata Kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan, Apresiasi Insan Kebudayaan;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Bidang Peningkaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Peningkaatan kapasitas tata Kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan, Apresiasi Insan Kebudayaan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

A. Tugas

Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksana di bidang destinasi pariwisata, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Destinasi Pariwisata melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata;
b. pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata;
d. monitoring dan evaluasi terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata;
e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1 Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata

Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata, meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kemitraan dan Kelembagaan;
- Menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kemitraan dan Kelembagaan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kemitraan dan Kelembagaan;
- Menyiapkan bahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Peningkatan

Kapasitas Masyarakat dan Kemitraan dan Kelembagaan;

- Menyiapkan bahan pengelolaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kemitraan dan Kelembagaan;
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kemitraan dan Kelembagaan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Pokja Kawasan Pariwisata

Pokja Kawasan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kawasan Pariwisata meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan di Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata;
- Menyiapkan bahan Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata;
- Menyiapkan bahan tata kelola Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata;
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata:

- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.3 Pokja Usaha Pariwisata

Pokja Usaha Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Usaha Pariwisata meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata, Penyusunan Profil usaha Pariwisata, Penghargaan kepariwisataan;
- Menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata, Penyusunan Profil usaha Pariwisata, Penghargaan kepariwisataan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata, Penyusunan Profil usaha Pariwisata, Penghargaan kepariwisataan;
- Menyiapkan bahan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata, Penyusunan Profil usaha Pariwisata, Penghargaan kepariwisataan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata, Penyusunan Profil usaha Pariwisata, Penghargaan kepariwisataan;
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata, Penyusunan Profil usaha Pariwisata, Penghargaan kepariwisataan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pemasaran Pariwisata

A. Tugas

Bidang Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan terkait pengembangan pasar pariwisata promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata;
b. pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata;
d. monitoring dan evaluasi terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata;
e. pelaporan dan rekomendasi terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1 Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata

Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pasar Pariwisata, meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Strategi Pasar Pariwisata, Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- Menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Strategi Pasar Pariwisata, Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, Pengembangan Investasi di Bidang Pengembangan Strategi Pasar Pariwisata, Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- Menyiapkan bahan Bidang Pengembangan Strategi Pasar Pariwisata, Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- Menyiapkan bahan pengelolaan Bidang Pengembangan Strategi Pasar Pariwisata, Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Bidang Pengembangan Strategi Pasar Pariwisata, Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2 Pokja Sarana Pemasaran Pariwisata

Pokja Sarana Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di Bidang Sarana Pemasaran Pariwisata meliputi :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kegiatan Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
- Menyiapkan bahan penyediaan dan pendistribusian media informasi pemasaran pariwisata Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3 Pokja Promosi Pariwisata

Pokja Promosi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi Pariwisata meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri;
- Menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Strategi Pasar Pariwisata, Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Bidang Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri;
- Menyiapkan bahan Bidang Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri;
- Menyiapkan bahan pengelolaan Bidang Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri;
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Bidang Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

7. Bidang Ekonomi Kreatif

A. Tugas

Bidang ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ekonomi Kreatif.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif pengembangan subsector ekonomi kreatif;
b. pelaksanaan kebijakan terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsector ekonomi kreatif;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsektor ekonomi kreatif;
d. monitoring dan evaluasi terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsektor ekonomi kreatif;
e. pelaporan dan rekomendasi terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsektor ekonomi kreatif; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7.1 Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif

Pariwisata melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif, meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
- Menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Bidang Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
- Menyiapkan bahan Bidang Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sarana

dan Prasarana Kota Kreatif;

- Menyiapkan bahan pengelolaan Bidang Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Bidang Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

7.2 Pokja SDM Ekonomi Kreatif

Pokja SDM Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang SDM Ekonomi Kreatif meliputi :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwsata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwsata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- Menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwsata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Bidang Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- Menyiapkan bahan Bidang Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwsata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- Menyiapkan bahan pengelolaan Bidang Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwsata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Bidang Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwsata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

7.3 Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif

Pokja Pengambangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengambangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif meliputi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- Menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Bidang Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- Menyiapkan bahan Bidang Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- Menyiapkan bahan pengelolaan Bidang Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi Bidang Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD. UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Taman Budaya/Museum di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. UPTD terdiri dari :

1. Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan. Adapun fungsinya adalah :

   a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
   b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
   c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
   d. Pengelolaan ketatausahaan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1. Pokja Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan

Pokja Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan pertunjukan dan pergelaran serta pelestarian seni meliputi:

- Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan;
- Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan;
- Menyiapkan pelaksanaan konservasi, observasi dan restorasi kesenian yang hampir punah;
- Menyiapkan penelitian berbagai cabang dan jenis seni yang terancam punah;
- Menyiapkan pelaksanaan inventarisasi dan digitalisasi koleksi video berbagai ragam seni pertunjukan;
- Menyiapkan evaluasi dan bahan pelaporan di Bidang Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. Pokja Pelayanan Kepada Masyarakat

Pokja Pelayanan Kepada Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan pertunjukan dan pergelaran serta pelestarian seni meliputi:

- Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pelayanan pertunjukan dan pergelaran serta pelestarian seni;
- Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pelayanan pertunjukan dan pergelaran serta pelestarian seni;
- Menyiapkan pelayanan pemanduan bagi pengunjung dan Pengguna Taman Budaya;
- Menyiapkan Dokumentasi dan publikasi kegiatan pertunjukan dan pergelaran serta pelestarian seni;
- Menyiapkan pelaksanaan kemitraan dengan instansi / Lembaga / masyarakat;
- Menyiapkan evaluasi dan bahan pelaporan di Bidang Pelayanan pertunjukan dan pergelaran serta pelestarian seni;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman. Adapun fungsinya adalah :

a) penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pelestarian dan Pelayanan Permuseuman;
b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di Bidang Pelestarian dan Pelayanan Permuseuman;
c) evaluasi, dan pelaporan Bidang Pelestarian dan Pelayanan Permuseuman;
d) pengelolaan ketatausahaan; dan
e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Pokja Pelestarian

Pokja Pelestarian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelestarian Koleksi Museum meliputi:

- Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pelestarian koleksi Museum;
- Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pelestarian koleksi Museum;
- Menyiapkan pelaksanaan konservasi, observasi dan restorasi benda koleksi;
- Menyiapkan penelitian benda koleksi Museum;
- Menyiapkan pelaksanaan inventarisasi dan digitalisasi koleksi Museum;
- Menyiapkan evaluasi dan bahan pelaporan di Bidang Pelestarian koleksi Museum;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Pokja Pelayanan Permuseuman

Pokja Pelayanan Permuseuman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelestarian Koleksi Museum meliputi:

- Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pelayanan Permuseuman;
- Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pelayanan Permuseuman;
- Menyiapkan pelayanan pemanduan bagi pengunjung Museum;
- Menyiapkan promosi koleksi Museum dan tata pamer;

- Menyiapkan pelaksanaan kemitraan dengan instansi / Lembaga / masyarakat;
- Menyiapkan evaluasi dan bahan pelaporan di Bidang Pelayanan Permuseuman;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selanjutnya struktur organisasi Dinas Kebudayaaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ....., sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Bagan Organisasi Dinas Kebudayaaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

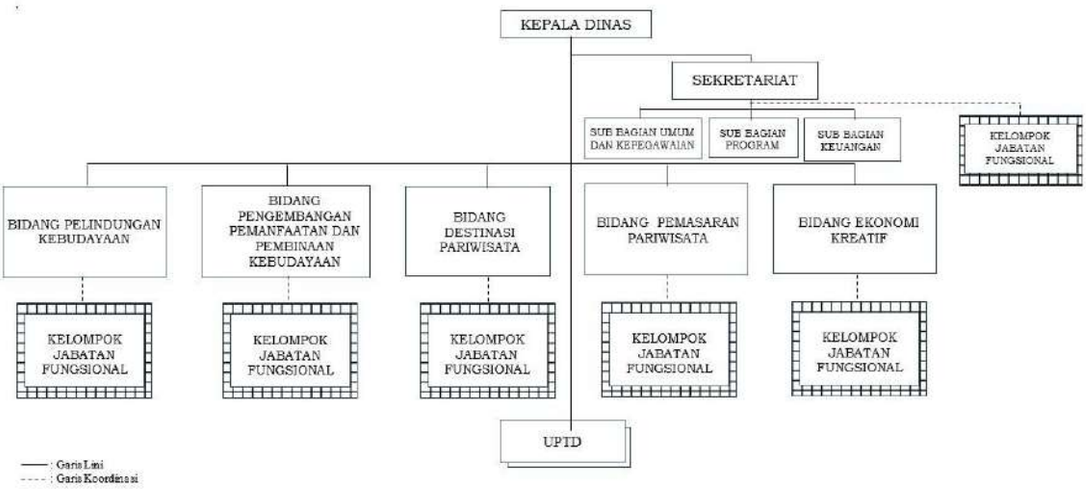

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

2.2.1. Sumber Daya Kepegawaian

Sumber Daya Kepegawaian berdasarkan eselon, selengkapnya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	II	1
2	III	7
3	IV	9
	JUMLAH	**17**

Sumber : Profil Kepegawaian SIMPEG Provinsi Jawa Tengah (posisi Februari 2025)

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah terdapat 14 jabatan struktural. Untuk data lengkap pejabat struktural yang ada pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah yaitu terdiri dari Kepala Dinas pada eselon II; Sekretariat, Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan, Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Kepala UPTD Museum Ranggawarsita, Kepala UPTD Taman Budaya Jawa Tengah, pada eselon III; serta Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Kelompok Kerja Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan, Kelompok Kerja Pelindungan Cagar Budaya, Kelompok Kerja Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan, Kelompok Kerja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Kelompok Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata, Kelompok Kerja Kawasan Pariwisata, Kelompok Kerja Usaha Pariwisata, Kelompok Kerja Pengembangan Pasar Pariwisata, Kelompok Kerja Promosi Pariwisata, Kelompok Kerja Sarana Pemasaran Pariwisata, Kelompok Kerja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Kelompok Kerja SDM Ekonomi Kreatif, Kelompok Kerja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Museum Ranggawarsita, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Taman Budaya Jawa Tengah, pada eselon IV.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	27
2	Bidang Pelindungan Kebudayaan	14
3	Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	13
4	Bidang Pemasaran Pariwisata	16
5	Bidang Destinasi Pariwisata	15
6	Bidang Ekonomi Kreatif	12
7	Museum Ranggawarsita	36
8	Taman Budaya Jawa Tengah	39
Jumlah		**172**

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Posisi September 2025)

Sedangkan data pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	11
2	Golongan III	111
3	Golongan II	43
4	Golongan I	6
Jumlah		**172**

Sumber : SIMPEG Provinsi Jawa Tengah (posisi Mei 2025)

2.2.2. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Keterangan	
1	Bangunan Gedung Kantor.Bangunan Gedung Kantor Permanen	14	1	Kantor, Jl. Pemuda 136 Rt 01 Rw 02 Kelurahan, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang
			2	Kantor/Tic, Jl. Pemuda No. 147 Rt 03 Rw 01 Kel. Sekayu, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang
			3	Jl. Pemuda 136 Rt 01 Rw 02 Kelurahan, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang
			4	Goa Seplawan, Pedukuhan Katerban Rt 03 Rw 01 Desa, Donorejo, Kaligesing, Kab. Purworejo
			5	Goa Seplawan, Desa Donorejo, Kaligesing, Kab. Purworejo
			6	Rumah Negara, Perum Semarang Indah Blok Di/21 Rt 02 Rw 09 Kelurahan Tawang Mas,Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang
			7	Rumah Negara Perum Semarang Indah Blok Di/28 Kelurahan Tawang Mas,Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang
			8	Rumah Negara Perum Semarang Indah Blok Di/32 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Tawang Mas,Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang
			9	Rumah Negara, Perum Semarang Indah Blok Di/35 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Tawang Mas,Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang
			10	Rumah Negara, Perum Semarang Indah Blok Di/23 Rt. 02 Rw 09 Kelurahan Tawang Mas ,Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang
			11	Hotel Karimunjawa, Jl. Danang Jaya Dusun Kapuran Rt 04 Rw 01 Desa Karimunjawa ,Karimunjawa, Karimun Jawa, Kab. Jepara
			12	Hotel Pondok Slamet, Karangmangu, Kemutug Lor 11 Karangmangu, Baturraden, Kab. Banyumas
			13	Hotel Pringgosari, Jl. Grojokan Sewu,Tawangmangu, Tawangmangu, Kab. Karanganyar
			14	Hotel Garuda, Desa Sido Mukti Rt 004 Rw 005 Desa Kopeng Kecamatan Getasan,Getasan, Getasan, Kab. Semarang
			15	Bangunan Gedung Pendopo Ageng Gendon Humardani Dan Kuncungan, Taman Budaya Jawa Tengah, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel.Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta
			16	Bangunan Gedung Pertemuan R.Rapat Wisma, Taman Budaya Jawa Tengah, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel.Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta
			17	Bangunan Gedung Gudang, Taman Budaya Jawa Tengah, Jl. Ir.Sutami No.57

				Kel.Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta
			18	Bangunan Gedung Theater Arena, Taman Budaya Jawa Tengah, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel.Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta
			19	Bangunan Gedung Pos Jaga I, Taman Budaya Jawa Tengah, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel.Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta
			20	Bangunan Gedung Penunjang Pendopo Ageng Gendon Humardani, Taman Budaya Jawa Tengah, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel.Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta
			21	Bangunan Gedung Gudang V, Taman Budaya Jawa Tengah, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel.Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta
			22	Bangunan Gedung Gudang II, Taman Budaya Jawa Tengah, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel.Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta
			23	Bangunan Gedung Galeri Seni Rupa I, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			24	Bangunan Gedung Studio Pedalangan, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			25	Bangunan Gedung Gudang (SR)IV, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			26	Bangunan Gedung Galeri Seni Rupa II / Galeri Besar, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			27	Bangunan Gedung WIsma Seni I dan Pendopo, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			28	Bangunan Gedung Studio Musik, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			29	Bangunan Gedung Gudang I, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			30	Bangunan Gedung Mushola I Galeri, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			31	Bangunan Gedung Wisma Seni, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			32	Bangunan Gedung Gudang VI, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			33	Bangunan Gedung Pertemuan/R Belajar, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			34	Bangunan Gedung Wisma Seni III, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			35	Bangunan Gedung Wisma Seni IV dan Door Loop, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			36	Bangunan Gedung Bangsal Gamelan I, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta

			37	Bangunan Gedung Bangsal Gamelan II, Taman Budaya Jawa Tengah, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel.Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta
			38	Bangunan Gedung Bangsal Gamelan VI, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			39	Bangunan gedung Bangsal Gamelan IV, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			40	Bangunan Gedung Bangsal Bangunan V, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			41	Bangunan Gedung Bangsal Gamelan III, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			42	Bangunan Gedung Sekretariat, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			43	Bangunan Gedung Dapur dan Ruang Makan/Ruang Kaca Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			44	Bangunan Gedung Studio Rekam, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			45	Bangunan Gedung Wisma Seni V, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			46	Bangunan Gedung Teater Bong, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			47	Bangunan Gedung Rumah Genset, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			48	Bangunan Gedung Gudang Peralatan Rumah Tangga, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			49	Bangunan Gedung Gudang Peralatan Sound System, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			50	Bangunan Gedung Gudang Peralatan Wisma Seni, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			51	Bangunan Gedung Mushola II Wisma Seni, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			52	Bangunan Gedung Tempat Parkir, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			53	Bangunan Gedung Besalen Keris, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			54	Bangunan Gedung Transit Wisma Seni, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			55	Bangunan Gedung Wisma VI, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta

			56	Bangunan Taman, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			57	Bangunan Gedung Receptionis Wisma Seni, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			58	Bangunan Gedung Besalen Gamelan, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			59	Bangunan Gedung Pembuatan Batik, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			60	Bangunan Gapura/Gerbang, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			61	Bangunan Gedung Art Shop, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			62	Bangunan Papan Baliho, Taman Budaya Jawa Tengah Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			63	Bangunan Gedung Konstruksi Tempat Parkir, Taman Budaya Jawa Tengah Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			64	Bangunan Gedung Rumah Dinas, Papan Nama, Pagar Samping, Jl. Ir.Sutami No.57 Kentingan, Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			65	Bangunan Gedung Teater Tertutup, Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			66	Bangunan Gedung Pos Jaga II, Taman Budaya Jawa Tengah Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			67	Bangunan Pintu Gerbang, Taman Budaya Jawa Tengah Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			68	Bangunan Pembuangan Tempat Sampah, Taman Budaya Jawa Tengah Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			69	Bangunan Food Court Center, Taman Budaya Jawa Tengah Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			70	Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan Taman Relief), Taman Budaya Jawa Tengah Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			71	Pembangunan Gedung (Pembangunan Jalan Pedestrian), Taman Budaya Jawa Tengah Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			72	Pembangunan Pos Jaga Depan, Taman Budaya Jawa Tengah Jl. Ir.Sutami No.57 Kel. Jebres Kec. Jebres Surakarta,Jebres,

				Jebres, Kota Surakarta
			73	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita, Gedung A Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			74	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita Gedung B, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			75	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita Gedung C, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			76	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita Gedung D, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			77	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita Kantin Depan Gedung Blok E, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			78	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita Ruang Tiket Gedung Blok F, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			79	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita Gedung Pamer Blok G, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			80	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita Gedung Blok H Penginapan, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			81	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita Gedung Pos Satpam Samping, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			82	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita Gapura Depan, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			83	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita Bangunan Genset, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			84	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita Pos Satpam Depan, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			85	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita Kantin Depan, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			86	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita

				Kantin Belakang, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			87	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita Taman Permanen, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			88	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita bangunan Pagar Bumi, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
			89	Bangunan Gedung Museum Ranggawarsita gapura Samping, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 1 Kalibanteng Semarang,Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang
2	Tanah	25	1	Desa, Donorejo, Kaligesing, Kab. Purworejo
			2	Dusun Susukan Desa, Susukan, Ungaran Timur, Kab. Semarang

No	Uraian	Jumlah	Keterangan	
			3	Dusun Susukan, Desa, Susukan, Ungaran Timur, Kab. Semarang
			4	Jl. Kimangunsarkoro No.12 Kelurahan , Karang Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang
			5	Blok Dx/No16, Semarang Indah Kelurahan , Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang
			6	Blok Di/21 Semarang Indah Kelurahan , Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang
			7	Blok Di/28 Semarang Indah Kelurahan , Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang
			8	Blok Di/32 Semarang Indah Kelurahan , Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang
			9	Blok Di/35 Semarang Indah Kelurahan , Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang
			10	Blok Di/23 Semarang Indah Kelurahan , Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang
			11	Jl. Pemuda 136 Kelurahan , Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang
			12	Jl. Raya Kopeng-Magelang Km.14 Dusun Sidomukti Rt. 004 Rw. 005 Desa Kopeng , Getasan, Getasan, Kab. Semarang
			13	Jl. Raya Kopeng-Magelang Km.14 Dusun Sidomukti Rt. 004 Rw. 005 Desa Kopeng , Kopeng, Getasan, Kab. Semarang
			14	Jalan Danang Jaya Dusun Kapuran Rt. 04 Rw. 01 Desa Karimun Jawa, Karimunjawa, Karimun Jawa, Kab. Jepara
			15	Jalan Danang Jaya Dusun Kapuran Rt. 04 Rw. 01 Desa Karimun Jawa, Karimunjawa, Karimun Jawa, Kab. Jepara
			16	Desa Karangmangu Rt. 06 Rw. 02 No. 13, Kemutug Lor 11 Karangmangu, Baturraden, Kab. Banyumas
			17	Jalan Grojogansewu, Dk.Karangsari Rt. 01 Rw. 07 Kel. Tawangmangu, Tawangmangu, Tawangmangu, Kab. Karanganyar
			18	Desa Sidaharja Kec. Suradadi, Sidaharja,

				Suradadi, Kab. Tegal
			19	Jalan Pemuda No. 147 , Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang
			20	Desa, Paseban, Bayat, Kab. Klaten
			21	Desa Krikilan Kec. Kalijambe Sragen, Krikilan, Kalijambe, Kab. Sragen
			22	Desa Krikilan Kec. Kalijanbe Kab. Sragen, Krikilan, Kalijambe, Kab. Sragen
			23	Kadilangu, Demak Kota, Demak, Kadilangu, Demak, Kab. Demak
			24	Bintoro, Kec. Demak Kota, Demak, Bintoro, Demak, Kab. Demak
			25	Desa Karang Mangu Kec.Baturaden Purwokerto, Kemutug Lor 11 Karangmangu, Baturraden, Kab. Banyumas
			26	Kantor Taman Budaya Jawa Tengan, Jl. Ir.Sutami No.57 , Jebres, Jebres, Kota Surakarta
			27	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, Jl. Abdul Rahman Saleh No.1 Kalibanteng Kidul Semarang 50149, Kalibanteng Kidul, Semarang Barat, Kota Semarang

No	Uraian	Jumlah	Keterangan	
3	Peralatan Dan Mesin			
3.1	Kendaraan Roda 4	12	1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.Multi Purpose Vehicle (Mpv)
			2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.Multi Purpose Vehicle (Mpv)
			3	Kendaraan Bermotor Penumpang.Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
			4	Kendaraan Bermotor Penumpang.Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
			5	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.Station Wagon
			6	Kendaraan Bermotor Penumpang.Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
			7	Kendaraan Bermotor Penumpang.Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
			8	Kendaraan Bermotor Penumpang.Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
			9	Kendaraan Bermotor Penumpang.Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)
			10	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.Station Wagon
			11	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.Station Wagon
			12	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.Station Wagon
3.2	Kendaraan Roda 2	8		Kendaraan Bermotor Beroda Dua.Sepeda Motor
4	Jalan Khusus Jalan Khusus Jalan Khusus	1		Pengaspalan Halaman Parkir Museum Manusia Purba Sangiran, Jl. Sangiran Km 4 Desa Krikilan ,Krikilan, Kalijambe, Kab. Sragen
5	Kontruksi Dalam Pengerjaan	2	1	Ded Tic Jl. Pemuda No 147
			2	Ded Goa Seplawan

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah (September 2025)

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

2.3.1. Pencapaian Kinerja Indikator

Berdasarkan analisis terhadap realisasi capaian indikator kinerja diketahui bahwa rata-rata hasil capaian indikator diatas target indikator kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian urusan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan kinerja yang baik. Gambaran Umum hasil kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari capaian indikator saebagai berikut ini:

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
A	**RENSTRA PD TAHUN 2018 - 2023**																						
1	**Tujuan PD**																						
	Angka Partisipasi Seni dan Budaya	Angka		10		10,5	10,61	11	11,5	12		10,51	10,61	10,61	11,5	12		100,1	100	96,45	100	100,00	
2	**Sasaran PD**																						
	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%		3,15		3,5	4,7	5,9	6,2	6,82		3,8	4,9	5,68	6,2	6,82		108,57	104,26	96,27	100	100,00	
3	**Program**																						
	Persentase jenis budaya yang terlayani	%		3,15		3,5	4,7	5,9	6,2	6,82		3,8	4,94	5,68	6,2	6,82		108,57	105,11	96,27	100	100,00	
	Persentase seni budaya kabupaten/kota yang terfasilitasi	%		-		68,57	71,42	74,28	77,14	80		85,71	71,42	80	91,43	100		125	100	107,7	118,52	125,00	
	Persentase siswa dan anggota paguyuban penghayat kepercayaan yang terlayani	%		20,16		22,4	26,4	30,4	34,4	37,84		29,11	29,11	31,2				129,96	110,27	102,63	0	0,00	
	Persentase status Cagar Budaya	%		17,1		19	19,3	19,6	19,9	21,89		19,51	19,51	22,1	22,71	23,62		102,68	101,09	112,76	114,12	107,90	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Persentase sumber belajar berbasis budaya	%		0,25		0,28	0,32	0,36	0,39	0,42		0,33	0,33	0,36	0,39	0,42		117,86	103,13	100	100	100,00	
	Survei Kepuasan Pengunjung Museum	%		81		88	88,2	88,4	88,6	88,7		89	89,09	89,6	89,36	89,84		101,14	101,01	101,36	100,86	101,29	
	RENSTRA PD TAHUN 2024 - 2026																						
A	**TUJUAN**																						
	Angka Melek Budaya	%									52,32						52,61						100,55
B	**SASARAN**																						#DIV/0!
	Persentase karya budaya berperingkat nasional	%									15,89						17,62						110,89
	Persentase Cagar Budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	%									22,44						23,45						104,50
	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	%									28,23						28,25						100,07
C	**PROGRAM**																						
	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan berperingkat nasional	%									19,17						22,08						115,18

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023						Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun						Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
				2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
	Tingkat partisipasi pemeringkatan Objek Pemajuan Kebudayaan	%									23,76						23,76						100,00
	Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	%									47,61						47,61						100,00
	Persentase cakupan pelestarian seni	%									100						100						100,00
	Tingkat partisipasi seni tradisi	%									8,89						8,89						100,00
	Persentase akses literasi sejarah	%									52,9						52,9						100,00
	Persentase Cagar Budaya berperingkat nasional	%									12,71						13,16						103,54
	Tingkat partisipasi pemeringkatan Cagar Budaya	%									25,13						25,67						102,15
	Nilai survey kepuasan pengunjung museum	%									89,85						90,08						100,26

NO	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	Target IKK	SATUAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Program																					
	RENSTRA 2019-2023																					
8.	Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	-	-	%	43,48	52,17	60,87	69,57	78,26	N/A	43,48	21,74	21,73	69,57	82,61	N/A	100	41,67	35,69	100	105,56	N/A
9.	Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	%	14	28	42	56	70	N/A	16,5	23	55,3	88,4	83,18	N/A	117,85	82,14	131,66	157,85	118,83	N/A
10.	Kunjungan Wisatawan Nusantara	-	-	Orang	46.645.745	14.973.707	18.717.134	11.529.754	N/A	N/A	57.900.863	22.629.085	21.332.409	46.465.437	N/A	N/A	124,12	151,12	112,97	403	N/A	N/A
11..	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	-	-	Orang	857.710	57.394	71.743	675	N/A	N/A	691.699	78.290	1.793	144.691	N/A	N/A	80,64	136,40	2,49	21.435,70	N/A	N/A
12.	Kunjungan Wisatawan	-	-	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	17.295.375	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	53.885.106	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	311,56	N/A
13.	Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	-	%	N/A	25,53	31,91	35,11	N/A	N/A	N/A	21,28	46	73,81	N/A	N/A	N/A	83,35	144,15	210,22	N/A	N/A
14.	Persentase pelaku	-	-	%	N/A	60	80	100	N/A	N/A	N/A	40	51,46	100	N/A	N/A	N/A	66,66	64,312	100	N/A	N/A

	ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi																					
15.	Persentase KaTa Kreatif	-	-	%	N/A	N/A	N/A	N/A	5,71	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	5,71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
16.	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi	-	-	%	N/A	N/A	N/A	N/A	59,72	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A	102,49	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	171,62	N/A
	RPD 2024-2026																					
6.	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	-	-	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13,33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13,33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
7.	Jumlah kunjungan wisatawan	-	-	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49.985.228	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	69.480.726	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	139
8.	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	-	-	Kab/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
9.	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	-	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48,98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51,79	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105,74
10.	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	-	-	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
11.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	-	-	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100

12.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	-	-	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tujuan																					
	RENSTRA 2019-2023																					
1.	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata			%	3.17	3.19	3,21	3.23	3.25	N/A	3.21	2.99	3,06	3.39	3,4	N/A	101.26	93.73	95,33	104.95	104,61	N/A
2.	Nilai Kepuasan Masyarakat			%	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	80	100	N/A	100	100	100	80	100	N/A
	RPD 2024-2026																					
1	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata			%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	119.35
2	Nilai tambah ekonomi kreatif			Rupiah (trilyun Rp.)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,686	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,630	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	215.3
3	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)			Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79.31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79.31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
	Sasaran																					
	RENSTRA 2019-2023																					
1.	Nilai Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara			Rupiah	17.529.084	5.229.807	5.680,840	5.753.034	6.040.686	N/A	18.062.192	5.159.437	5.602,198	7.063,150	7,520.862	N/A	103.04	98.65	98.61	116,92	124,5	N/A
4.	Nilai Kepuasan Masyarakat			Laporan	100.00	100	100	100	100	N/A	100.00	100	100	80	100	N/A	100	100	100	80	100	N/A

5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			%	62.00	64.00	70	73.5	75,46	N/A	74.03	75.13	76,06	78.31	76,46	N/A	119.40	117.39	108,65	106.54	100	N/A
	RPD 2024-2026																					
5.	Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah			Rupiah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.054.297	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.863.693	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105.76
6.	Jumlah kabupaten/kota kreatif			Kab./Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
7.	Indeks Manajemen Risiko			Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat			Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 2.5, maka dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

a. Renstra PD Tahun 2018 - 2023

1. Indikator Tujuan

   - Terdapat 1 (satu) indikator, yaitu Angka Partisipasi Seni dan Budaya di tahun 2021, yang capaiannya mengalami penurunan, hal ini dikarenakan belum optimalnya partisipasi pelaku seni dan budaya dalam pemajuan kebudayaan sedangkan untuk Indikator Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata, dan Nilai Kepuasan Masyarakat capaiannya kenaikan diahir periode akhir Renstra.

2. Indikator Sasaran

   Terdapat 8 (delapan) indikator sasaran yang terdiri dari:

   a) Persentase Jenis Budaya Yang Terlayani dengan capaian sesuai dengan target;
   b) Persentase Seni Budaya Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi dengan capaian melebihi target;
   c) Persentase Siswa dan Anggota Paguyuban Penghayat Kepercayaan Yang Terlayani dengan capaian di bawah target;
   d) Persentase Status Cagar Budaya dengan capaian melebihi target;
   e) Persentase Sumber Belajar Berbasis Budaya dengan capaian sesuai target;
   f) Nilai Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara,
   g) Jumlah Pengeluaran Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara).
   h) Survei Kepuasan Pengunjung Museum dengan capaian melebihi target.

   Dari 8 Indikator tersebut,terdapat 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Jenis Budaya Yang Terlayani di tahun 2021 yang capaian indikator ini mengalami penurunan, hal ini dikarenakan jenis budaya yang aktif terbatas karena masa pandemi covid 19.

b. Renstra PD Tahun 2024 - 2024

1. Indikator Tujuan

   Terdapat tiga indikator, yaitu Angka Melek Budaya dengan capaian melebihi target; Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata dan Nilai tambah ekonomi kreatif yang kesemuanya target indikatornya tercapai.

2. Indikator Sasaran

   - Terdapat 5 (lima) indikator, Persentase Karya Budaya Berperingkat Nasional, Persentase Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

Yang Dilayankan, Persentase SDM dan Lembaga Kebudayaan Yang Dilayani, Jumlah Pengeluaran wisatawan dan jumlah kabupaten/kota kreatif. Capaian 5 (lima) indikator ini melebihi target, hal ini dikarenakan dukungan dari pemangku kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten/ Kota dalam bersinergi dengan provinsi terjalin dengan baik.

3. Indikator Program

Terdapat 9 (sembilan) indikator yang terdiri dari:

a) Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Berperingkat Nasional dengan capaian melebihi target;
b) Tingkat Partisipasi Pemeringkatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan capaian sesuai target;
c) Persentase Akses Pengembangan SDM Kebudayaan dengan capaian sesuai target;
d) Persentase Cakupan Pelestarian Seni dengan capaian sesuai target;
e) Tingkat Partisipasi Seni Tradisi dengan capaian sesuai target;
f) Persentase Akses Literasi Sejarah dengan capaian sesuai target;
g) Persentase Cagar Budaya Berperingkat Nasional dengan capaian melebihi target;
h) Tingkat Partisipasi Pemeringkatan Cagar Budaya dengan capaian melebihi target;
i) Nilai Survey Kepuasan Pengunjung Museum dengan capaian melebihi target;
j) Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan, capaian sesuai target;
k) Jumlah kunjungan wisatawan, capaian melebihi target;
l) Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan),capaian sesuai target;
m) Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi, capaian melebihi target;
n) Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah, Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah, dan
o) Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Anggaran

Evaluasi Kinerja Anggaran secara makro dapat dilihat dari data realisasi anggaran dalam kurun waktu 2019-2024 baik jumlah Anggaran APBD Menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung serta Jumlah Anggaran Belanja Langsung pada urususan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Urusan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Uraian	APBD pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	325.838.220	266.505.000	600.979.000	814.995.363	644.610.000	123.550.108	84.085.000	417.725.240	612.669.353	725.619.632	37,92	31,55	69,51	75	112,57	19,57	97,46
Belanja	13.750.776	26.489.959	37.152.500	44.008.300	38.485.672	12.907.924	23.818.439	35.643.460	41.303.660	34.347.861	93,87	89,91	95,94	94	89,25	35,98	33,22
Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-									

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Rp. (000)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rp. (000)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata – rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasin
Pendapatan	2.800.000	1.567.911	250.885	2.142.000	5.500.000	5.505.000	2.637.116,934	1.036.391,065	381.292,650	2.798.197	1.147.929,050	2.264.063,500	94,18	66,10	151,98	130,63	20,87	41,13	130,44	91,37
Belanja	538.315.715	74.088.366	262.910.421	288.448.798	256.507.945	328.974.312	500.985.645,011	65.039.442,605	254.357.580,554	274.212.100,329	250.734.799,899	322.156.100,824	93,07	87,79	97,75	95,06	4,35	92,93	32,59	38,63
Pembiayaan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 2.6 maka dapat diketahui dari segi anggaran selama 5 tahun, pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk urusan kebudayaan mengalami pertumbuhan rata – rata sebesar 19,57% hal ini dikarenakan sumber pendapatan bertambah dari perolehan Taman Budaya Jawa Tengah. Sedangkan jika dilihat dari pertumbuhan realisasi pendapatan dengan angka 97,46%. Dari mulai tahun 2020 – 2024 realisasi paling rendah terjadi di tahun 2021 hal ini dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan dari Taman Budaya Jawa Tengah mengalami penurunan dikarenakan pembatasan kegiatan dan dilakukan secara daring karena adanya wabah virus corona.

Sedangkan untuk belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah urusan kebudayaan juga mengalami rata – rata kenaikan sebesar 35,98%. Kenaikan ini dikarenakan anggaran berfokus pada belanja hibah. Rata – rata realisai belanja sebesar 33,22% hal ini dikarenakan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tabel 2.6 diatas, diketahui bahwa secara umum realisasi pendapatan sebagai kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan yang positif, dapat dilihat pada tabel rata-rata pertumbuhan. Dampak dari pandemi Covid 19 yang mana hampir di seluruh komponen realisasi pendapatan menurun. Tahun 2022 realisasi pendapatan meningkat sampai dengan tahun 2023, namun Tahun 2024 pendapatan turun hal ini dikarenakan daya saing terhadap usaha hotel/penginapan yang semakin pesat, hal ini berdampak bagi hotel yang kita kelola untuk bersaing, karena kondisi sarpras hotel/penginapan milik Pemprov masih dibawah standart hotel lainnya pada lokasi yang sama, dengan tarif harga yang hampir sama ; Di daerah Kopeng, Baturaden, dan Tawangmangu Karanganyar tingkat kunjungan wisata tinggi tetapi tingkat hunian yang rendah.

Anggaran belanja turun pada tahun 2020 karena adanya kebijakan refocusing yang difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 untuk penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat.

Mulai tahun 2021 sampai tahun 2022 anggaran mengalami kenaikan namun tahun 2023 turun kembali dikarenakan adanya kebijakan penanganan 9 Program Prioritas Pj. Gubernur Jawa Tengah, Tahun 2024 anggaran mengalami kenaikan kembali untuk melaksanakan Program Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing UMKM di Sektor Ekonomi Kreatif.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan bermuara pada upaya memperkokoh ketahanan budaya daerah Jawa Tengah, dengan ruang lingkup warisan budaya berupa benda maupun tak benda. Warisan budaya berupa Cagar Budaya, karya seni, sastra, maupun nilai, norma, etika, estetika, tatakrama serta bahasa daerah dapat menjadi jati diri dan identitas daerah. Tidak hanya itu, warisan budaya menjadi mesin penggerak dari banyak proses pembangunan, termasuk pariwisata dan ekonimi kreatif. Melalui pelestarian dan pengelolaan yang tepat, warisan budaya mampu menarik wisatawan dan menginspirasi lahirnya berbagai produk yang bernilai ekonomis. Dalam upaya pelestarian dan pengelolaan tersebut, terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Cagar Budaya

a. Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya tidak optimal. Hal ini terjadi karena:
   1) Pengambil keputusan dan pemangku kepentingan kurang memahami Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya;
   2) Tidak semua Sumber Daya Manusia yang ada memiliki latar belakang Arkeologi atau sertifikat kompetensi di bidang Cagar Budaya;
   3) Belum semua kabupaten/kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
   4) Sertifikat ahli Cagar Budaya dan/atau SK pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya habis masa berlakunya;
   5) Kurangnya alokasi dana serta sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan.

b. Belum ada *single* data Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya yang akurat dan dapat dijadikan acuan. Hal ini terjadi karena:
   1) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang melakukan pendataan;
   2) Sumber Daya Manusia yang ada tidak memiliki pengetahuan dan kompetensi terkait teknis pendataan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya;
   3) Terdapat beberapa sumber data Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya yang belum terintegrasi.

2. Permuseuman

a. Belum semua museum baik milik swasta maupun milik pemerintah daerah memiliki SK pendirian museum. Hal ini terjadi karena syarat pendirian museum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20215 tentang Museum tidak terpenuhi;
b. Tidak Sumber Daya Manusia yang ada memiliki sertifikat kompentensi di bidang permuseuman.

3. Kesenian

Belum ada single data jumlah seniman yang akurat. Hal ini terjadi karena:

1) Kurangnya sumber daya manusia yang melakukan pendataan;
2) Kurangnya suporting data dari kabupaten/kota.

4. Bahasa

Tenaga profesional di bidang seni yang belum memadai. Hal ini terjadi karena masih sedikit pelaku seni yang memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi (LSP) P-2 Kebudayaan Kementerian Kebudayaan atau lembaga sertifikasi lain yang berwenang.

5. Sejarah

Permasalahan sejarah diantaranya :

1) Rendahnya literasi tentang sejarah di masyarakat;
2) Rendahnya minat generasi muda untuk menulis dengan tema sejarah.

6. Nilai Tradisi

Permasalahan nilai tradisi diantaranya :

1) Lemahnya Kajian Karya Budaya, sehingga menghambat usulan penetapan WBTb;
2) Jadwal kegiatan perekaman yang bersamaan dan kurangnya Sumber Daya Manusia, menyebabkan pelaksanaan tidak optimal;
3) Digitalisasi data budaya belum berjalan maksimal;
4) Pemahaman sumber daya manusia terkait pelestarian WBTb masih kurang;
5) Komunikasi dengan kabupaten/kota tidak optimal.

Berdasarkan identifikasi masalah urusan pendidikan dan kebudayaan di atas maka pemetaan masalah pokok, masalah, dan akar masalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Permasalahan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dihasilkan dari capaian kinerja pelayanan hingga tahun 2024 dapat dilihat dari tabel 2.5. Dinamika capaian kinerja tersebut memiliki relevansi untuk memproyeksikan apa yang menjadi potensi yang mempengaruhi arah kebijakan dan strategi yang dapat direncanakan dengan baik dalam agenda Renstra 2025 - 2029. Dengan capaian kinerja pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

serta capaian realisasi anggaran tahun 2020-2024 urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dapat dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan sebagi berikut :

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	**Kurangnya partisipasi budaya**	1. Kurangnya kapasitas SDM dan Lembaga Kebudayaan	1. Kurangnya pembinaan & peningkatan kapasitas bagi SDM dan Lembaga Kebudayaan
		2. Kurangnya pemanfaatan karya budaya	1. Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor
		3. Belum optimalnya pelindungan dan pengembangan karya budaya	1. Minimnya kajian terhadap karya budaya 2. Kurangnya pendaftaran dan pendataan potensi karya budaya setiap Kab/Kota
		4. Tatakelola kebudayaan belum optimal	1. Belum optimalnya pendataan/identifikasi SDM dan Lembaga Kebudayaan serta karya budaya 2. Kurangnya komitmen bersama seluruh stakeholder
2.	Belum Optimalnya Pembangunan Keparwisataan	1. Strategi Pemasaran pariwisata belum optimal	1. Strategi pemasaran pariwisata belum sesuai dengan segmen pasar wisatawan 2. Kualitas promosi pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal 3. Publikasi Informasi terkait promosi pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah 4. Kurangnya SDM, Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pemasaran Pariwisata
		2. Kualitas Destinasi pariwisata provinsi (DPP) masih rendah	1. Kualitas tata kelola kawasan pariwisata masih rendah 2. Daya saing dan standar mutu Daya Tarik Wisata (DTW) masih rendah 3. Kualitas usaha pariwisata usaha dan ekonomi kreatif masih rendah

		3. Kualitas dan Kuantitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah	1. Kurangnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten 2. Terbatasnya pendampingan dan penguatan SDM dan Kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif kurang optimal 4. Kurangnya pemahaman tentang Kabupaten/Kota kreatif (KaTa kreatif)
		4. Belum optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1. Masih rendahnya perlindungan produk pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) yang belum optimal 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana pengembangan ekonomi kreatif

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis pelaksanaan urusan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Tengah diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berbagai isu strategis global, nasional, maupun daerah yang tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah lima tahun ke depan dengan pertimbangan. Dalam penentuan isu strategis daerah Jawa Tengah lima tahun ke depan terkait dengan isu-isu yang ada Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Berbagai isu tersebut tergambarkan dalam tabel isu strategis global, nasional, dan daerah sebagai berikut.

Tabel 2.8

Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 2. Peraturan Gubernur Provinsi Jateng Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah 3. Terdapat sejumlah 1607 DTW 4. Terdapat 886 Desa Wisata 5. Terdapat usaha akomodasi sejumlah 2416 6. Terdapat usaha makanan dan minuman sejumlah 5315 7. Jawa tengah memiliki regulasi wisata ramah muslim 8. Terhubungnya tol Trans Jawa	1. Stagnasi pengembangan produk wisata dan pergerakan wisatawan belum merata; 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata masih berorientasi pada pembangunan jangka pendek; 3. Kurangnya SDM pariwisata yang kompeten; 4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas promosi pariwisata melalui media elektronik, media cetak, media sosial dan media luar ruangan 5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas promosi pariwisata dalam dan luar negeri melalui event dan MICE 6. Kualitas penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam		1. Program Pariwisata Digital 2. Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan lingkungan 3. Inflasi meningkatnya biaya perjalanan 4. Standarisasi ASEAN *Tool boxes* 5. Melemahnya nilai tukar Rupiah	1. Perubahan paradigma pariwisata dari *number oriented* menjadi *quality* dan *sustainability* 2. Pembangunan pariwisata yang inklusif melalui *community-based* tourism dan pemerataan infrastruktur pariwisata 3. Implementasi *Blue Green Circular Economy* (BGCE) di sektor pariwisata 4. Tantangan global termasuk ketidakpastian (v*olatility, uncertainty, complexity and ambiguity*/ VUCA), 5. Perubahan preferensi pasar, digitalisasi, dan permintaan akan industri pariwisata yang berkelanjutan 6. Perubahan preferensi konsumen yang mengarah pada	1. Promosi pariwisata belum optimal 2. Kondisi destinasi wisata termasuk kondisi sarana prasarana destinasi wisata, 3. Diversifikasi daya tarik pariwisata, 4. Infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata, 5. Integrasi antardestinasi wisata, 6. Kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, 7. Kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata 8. Belum operasional bandara Ahmad	1. Belum sinerginya pembangunan pariwisata antar pelaku / lembaga pariwisata 2. Belum optimalnya pendanaan pembangunan pariwisata

hingga Provinsi DIY	maupun luar negeri belum optimal 7. Belum optimalnya strategi pemasaran pariwisata			*health*, *safety*, dan *security*	Yani dan Bandara Adi Soemarmo sebagai Bandara Internasional yang menjadi Pintu masuk Wisatawan Mancane-gara	
Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah	1. Kurangnya SDM ekonomi kreatif yang kompeten; 2. Masih rendahnya perlindungan atas hasil kreatifitas dan kekayaan intelektual produk pariwisata dan ekonomi kreatif;		1. Kebijakan strategis yang terfokus pada subsektor spesifik, sehingga mampu meningkatkan daya saing internasional 2. Sistem perlindungan kekayaan intelektual yang kuat menjadi fondasi utama untuk mendorong inovasi dan meningkatkan ekspor--menjadikan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.	1. Keragaman Budaya dan Kreativitas Bangsa Indonesia Sebagai Sumber Daya Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan 2. Produk Ekonomi Kreatif yang Telah Menembus Pasar Global dan Penciptaan Peluang Investasi 3. Membangun Sistem Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang Efektif untuk Pemanfaatan Aset Intelektual 4. Gastrodiplomasi untuk Mendorong Peningkatan Ekspor, Nilai Tambah, dan Kesejahteraan Pelaku Kuliner 5. Perkembangan Industri Gim dan Transformasi Dunia	1. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, 2. Sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa, 3. Pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif, 4. Sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif 5. Infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk menduk ung	1. Masih terbatasnya sub sector Ekraf yang dikembangkan dari 17 Sub Sektor Ekraf 2. Belum tersedianya data base ekonomi kreatif 3. Belum tersedianya ruang infrastruktur fisik dan non fisik untuk pengembangan ekraf 4. Belum sinerginya pengembangan ekraf antar pelaku dan lembaga

				Virtual 6. Pengembangan Ekosistem Creator Economy 7. Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	pengembangan kreativitas, 6. Perlindung-an, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif 7. Sistem regulasi ekonomi kreatif, 8. Apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, 9. Jejaring kab/kota kreatif, desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan, 10. Standarisasi produk dan praktek usaha ekonomi	

					kreatif	
		1. Demand untuk ruang di kawasan pariwisata terutama di daerah resapan air meningkat 2. Maraknya ekowisata yang membuat bangunan-bangunan permanen 3. Kurang jelasnya pembagian tanggung jawab pengelolaan pariwisata sehingga masyarakat mengelola dengan tidak sistematis 4. Belum optimalnya pengembangan kepariwisataan berbasis desa 5. Pertumbuhan kegiatan komersial berupa tempat hiburan sering memunculkan permasalahan sosial 6. Faktor ekonomi rendah sehingga pariwisata di dataran tinggi meningkat 7. Wisata di pegunungan banyak yang tidak berwawasan lingkungan				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dari pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah "***Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan***". Dinas Kebudayaan, Priwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan yang akan dicapai selama tiga tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2025–2029, antara lain:

Tujuan I : **Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Kebudayaan yaitu Meningkatnya Partisipasi Budaya

Tujuan II : **Meningkatnya Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Pariwisata yaitu Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan serta Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif.

Tujuan III : **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis**

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan

Kesekretariatan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah serta Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan		Indeks Pembangunan kebudayaan	Angka	60,89	60,89	62,31	62,86	63,40	63,95	64,69	65,04	65,04
	Meningkatnya Partisipasi Budaya	Angka Melek Budaya	Angka	50,94	52,61	53,82	55,32	56,82	58,32	59,82	61,32	61,32
Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	N/A	N/A	12,61	13,08	13,54	14,01	14,47	14,26	14,26
	1. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Juta Rupiah	N/A	66.344.465	84.344.465	102.344.465	120.344.465	138.344.465	156.344.465	174.344.465	174.344.465
		2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,4	3,56	3,50	3,60	3,72	3,84	3,94	4,04	4,04
	2. Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan di Jawa Tengah	Rupiah	7.520.862	7.858.616	7.642.320	8.243.954	8.645.697	8.798.697	8.957.262	9.121.890	9.121.890

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	N/A	79,31	80,41	81,55	82,05	82,55	83,05	83,55	83,55
	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	N/A	3,01	3,02	3,03	3.04	3.05	3,06	3,07	3,07
	2, Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat Perangkat Daerah	Angka	N/A	75	76	77	78	79	80	81	81

3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari rencana strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan disajikan secara lengkap dalam tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Partisipasi Budaya	Peningkatan upaya pelestarian melalui pelindungan, pengembangan & pemanfaatan warisan budaya	1. Peningkatan upaya pelindungan melalui pencatatan dan pendokumentasian warisan budaya 2. Penetapan & pemutakhiran warisan budaya secara terpadu dan terintegrasi 3. Pelindungan nilai budaya dan pengembangan ragam karya melalui fasilitasi ruang ekspresi dan interaksi budaya yang inklusif 4. pengembangan warisan budaya berbasis inovasi 5. Optimalisasi pemanfaatan warisan budaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
			Peningkatan tata kelola kebudayaan melalui pembinaan SDM/ lembaga/ pranata kebudayaan, pendataan terpadu dan terintegrasi, serta kerjasama/kemitraan antar stakeholder	1. Pemetaan SDM/ lembaga/ pranata kebudayaan 2. Peningkatan upaya pembinaan SDM kebudayaan melalui peningkatan kapasitas dan penghargaan untuk pelaku budaya yang memiliki kontribusi aktif 3. Penguatan peran SDM/ lembaga kebudayaan sebagai agen diplomasi budaya 4. Penguatan jejaring agen diplomasi budaya untuk pemajuan kebudayaan 5. Penguatan kerjasama/kemitraan untuk pemajuan kebudayaan daerah
3	Meningkatkan Pembangunan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata dan	Peningkatan pengeluaran wisatawan	1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik 2. Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata 3. Pengelolaan Destinasi dan Kawasan Strategis

				Pariwisata Provinsi 4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Lanjutan
	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana KaTa Kreatif 4. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Selain itu penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijkan juga disajikan pentahapan pembangunan yang dimaksudkan untuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2030. Prioritas dalam setiap tahapan mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pentahapan dimaksud disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
URUSAN KEBUDAYAAN				
Penguatan ekosistem pemajuan kebudayaan melalui perbaikan tata kelola pemajuan kebudayaan	Peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya untuk pemajuan kebudayaan	Penguatan peran agen diplomasi kebudayaan	Pemantapan kerjasama lintas sektor dan kemitraan multipihak untuk pemajuan kebudayaan	Perwujudan ekosistem pemajuan kebudayaan yang sehat dan berkelanjut an
URUSAN PARIWISATA				
penguatan landasan pendorong kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;	peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis inovasi	percepatan peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;	Pemantapan Daya Saing dan Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB dan nilai tambah Ekonomi Kreatif	Perwujudan Pariwisata berkelanjutan dan nilai tambah ekonomi kreatif sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi

3.2. Manajemen Risiko Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.4
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Dinas Kebudayaan, Pariwisaya dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Tujuan : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Indek Pembangunan Kebudayan	Ketimpangan nilai budaya dengan pengaruh global	3	Arus budaya asing yang masuk dan menyebar	Menurunnya keragaman budaya bangsa, kerusakan/ hilangnya Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, ketidak seimbangan pengembangan dan pelestarian	Pelestarian nilai-nilai budaya dan Pemberdayaan ekositem kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahun 2029
Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Budaya	Angka Melek Budaya	Hilangnya identitas karena pengaruh global	3	Kesadaran berbudaya masih rendah, era society 5.0 dan budaya luar yang lebih progresif masuk ke sendi kehidupan	Krisis identitas atau orang Jawa kehilangan Jawanya	Fasilitasi dan kolaborasi ruang-ruang ekspresi budaya untuk memperkenalkan dan menarik generasi muda sadar akan budayanya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahun 2027
Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB	Masih rendahnya insentif, perlindungan produk, anggaran pengembangan	9	1. Rendahnya minat para investor dalam	Belum optimalnya capaian target Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi	Melakukan pemasaran terkait potensi daya tarik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Setiap Tahun

	Ekonomi Kreatif Nasional				Kreatif Nasional			

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	ekonomi Kreatif	parekraf, pembinaan, minimnya fasilitas parekraf, pemasaran parekraf, hingga belum optimalnya pasar domestik dan internasional yang mendukung pertumbuhan industri Parekraf di Provinsi Jawa Tengah		maupun luar negeri untuk berinvestasi pada sektor parekraf di Provinsi Jawa Tengah 2. Rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah 3. Strategi pemulihan Industri Parekraf belum dilakukan secara optimal	Kreatif	Wisata Jawa Tengah untuk meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan serta peningkatan mutu produk dan SDM Parekraf di Provinsi jawa tengah	Provinsi Jawa Tengah	

Sasaran 1: Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan	Pengeluaran Wisatawan	Menurunnya intensitas perjalanan wisatawan dan perubahan kebijakan dari pariwisata massal menjadi pariwisata yang berkualitas	9	1. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 2. Kurangnya dukungan kepada para pelaku parekraf dalam beradaptasi melalui teknologi digital, strategi	1. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 2. Kurangnya dukungan kepada pelaku parekraf melalui teknologi digital, strategi pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata berkelanjutan	Melakukan sosialisasi kepada pelaku parekraf	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	ekonomi Kreatif	parekraf, pembinaan, minimnya fasilitas parekraf, pemasaran parekraf, hingga belum optimalnya pasar domestik dan internasional yang mendukung pertumbuhan industri Parekraf di Provinsi Jawa Tengah		maupun luar negeri untuk berinvestasi pada sektor parekraf di Provinsi Jawa Tengah 4. Rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah 5. Strategi pemulihan Industri Parekraf belum dilakukan secara optimal	Kreatif	Wisata Jawa Tengah untuk meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan serta peningkatan mutu produk dan SDM Parekraf di Provinsi jawa tengah	Provinsi Jawa Tengah	

Sasaran 1: Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan	Pengeluaran Wisatawan	Menurunnya intensitas perjalanan wisatawan dan perubahan kebijakan dari pariwisata massal menjadi pariwisata yang berkualitas	9	3. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 4. Kurangnya dukungan kepada para pelaku parekraf dalam beradaptasi melalui teknologi digital, strategi	3. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 4. Kurangnya dukungan kepada pelaku parekraf melalui teknologi digital, strategi pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata berkelanjutan	Melakukan sosialisasi kepada pelaku parekraf	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
				pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata berkelanjutan				
Sasaran 2: Meningkatnya Jumlah Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang ditetapkan	Penetapan Kab/Kota (KaTa) Kreatif	Kurangnya pemahaman tentang Kab/Kota (KaTa) Kreatif	9	1. Kurangnya dukungan kolaborasi antar elemen ekraf di kab/kota 2. Kurang Optimalnya kreativitas dan inovasi-inovasi baru serta kolaborasi dengan jejaring pentahelix di Kab/Kota 3. Kurangnya regulasi terkait kebijakan tentang Ekraf	Kurangnya minat Kab/Kota (KaTa) mengikuti PMK3I	Optimalisasi kemitraan dengan stakeholder parekraf	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Setiap Tahun

Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Kawasan Pariwisata pada setiap Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Pariwisata yang dikembangkan	pengembangan 75awasan pariwisata tidak disertai dengan 75awasan7575an sarana prasarana pendukung lainnya	9	perencanaan lintas 75awasan75 pada Pengembangan Kawasan Pariwisata dari segi aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ancillary kurang terkoordinasi	Hasil pengembangan 75awasan pariwisata belum optimal dimanfaatkan	Optimalisasi pengembangan Kawasan Pariwisata dari segi aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ancillary	Dinas Kebudayaan , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Sasaran : Meningkatnya Kab/Kota yang dipetakan dan diidentifikasi potensinya untuk menetapkan subsektor ekraf yang bisa menjadi unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PMK3I)	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang teruji petik	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang teruji petik tidak sesuai target waktu yang ditentukan	6	Kurangnya Pemahaman pelaku ekraf tentang Kabupaten/Kota kreatif (KaTa kreatif) dan minimnya pembiayaan	Proses Uji petik Kab/Kota (KaTa) Kreatif menjadi lebih lama	Optimalisasi pemahaman KaTa kreatif dan penyediaan anggaran	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Setiap Tahun
Sasaran : Meningkatnya SDM Parekraf yang tersertifikasi	Jumlah SDM Parekraf yang Tersertifikasi	Kurangnya fasilitasi sertifikasi uji kompetensi SDM Parekraf	9	Rendahnya dukungan dan penguatan sektor parekraf	Kurangnya SDM Parekraf yang kompeten	Penguatan fasilitasi sertifikasi uji kompetensi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Setiap Tahun

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Mengacu pada rencana program dalam Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029 yang terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Tahun 2025-2029 yaitu :

1. **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**
   A. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
   B. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2. **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**
   A. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**
   A. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
4. **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**
   A. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
   B. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
5. **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**
   A. Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi
6. **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**
   A. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
   B. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
   C. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

D. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

7. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

A. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

8. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

B. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

9. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

A. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

B. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan pembangunan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif *												14,258,609,000		38,883,104,000		18,028,953,000		34,671,681,000		33,631,550,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
							Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum *	%	3.56	3.5	3.6		3.72		3.84		3.94		4.04		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
							Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi	%	N/A	12.61	13.08		13.54		14.01		14.47		14.26		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekono	

							Kreatif Nasional *												mi Kreatif	
	Meningkatnya pengeluaran wisatawan **										9,523,609,000		30,988,104,000		13,823,953,000		28,456,681,000		27,416,550,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
							Pengeluaran Wisatawan **	Rupiah	7510765	7642320	8243954	9,523,609,000	8645935	30,988,104,000	8796897	13,823,953,000	8957262	28,456,681,000	9121890	27,416,550,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA ***								3,250,000,000		7,368,104,000		4,050,000,000		6,800,000,000		6,800,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Meningkatnya daya tarik pada destinasi pariwisata pada setiap wilayah pengembangan (WP)	Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan ***	%	13.04	26.08	20	2,750,000,000	20	7,368,104,000	20	4,050,000,000	20	6,800,000,000	20	6,800,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang	

																			Destinasi Pariwisata	
		3.26.02.1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi ****								2,000,000,000		4,618,104,000		2,600,000,000		4,050,000,000		4,050,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Meningkatnya pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Daya Tarik Wisata Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya ****	Lokasi	N/A	3	3	2,000,000,000	3	4,618,104,000	3	2,600,000,000	3	4,050,000,000	3	4,050,000,000	Pokja Kawasan Pariwisata	
		3.26.02.1.01.0001			Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi *****							200,000,000		300,000,000		200,000,000		300,000,000		300,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Ditetapkannya Daya Tarik Wisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata	Lokasi	N/A	N/A	2	200,000,000	2	300,000,000	1	200,000,000	2	300,000,000	1	300,000,000	Pokja Kawasan Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata

						Unggulan Provinsi	Unggulan Provinsi *****													JAWA TENGAH
		3.26.02.1.01.0005			Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi *****	Lokasi	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Kawasan Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata JAWA TENGAH
		3.26.02.1.01.0006			Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi *****							300,000,000		500,000,000		300,000,000		500,000,000		500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekono	

																				mi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	2	300,000,000	2	500,000,000	2	300,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	Pokja Kawasan Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata JAWA TENGAH
		3.26.02.1.01.0007			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi *****							500,000,000		1,350,000,000		600,000,000		1,350,000,000		1,350,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya	Laporan	1	1	2	500,000,000	2	1,350,000,000	2	600,000,000	2	1,350,000,000	2	1,350,000,000	Pokja Kawasan Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata JAWA TENGAH

							Tarik Wisata Provinsi *****													
		3.26.02.1.01.0008			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi *****							1,000,000,000		2,468,104,000		1,500,000,000		1,900,000,000		1,900,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya *****	Orang	N/A	150	500	1,000,000,000	640	2,468,104,000	640	1,500,000,000	640	1,900,000,000	640	1,900,000,000	Pokja Kawasan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
		3.26.02.1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi ****								200,000,000		850,000,000		650,000,000		850,000,000		850,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	

						Meningkatnya pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Destinasi Pariwisata Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya ****	Lokasi	N/A	1	3	200,000,000	3	850,000,000	3	650,000,000	3	850,000,000	1	850,000,000	Pokja Kawasan Pariwisata	
		3.26.02.1.03.0001			Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi *****							0		0		100,000,000		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan *****	Lokasi	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	1	100,000,000	N/A	0	N/A	0	Pokja Kawasan Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata JAWA TENGAH
		3.26.02.1.03.0002			Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	

					Tersediannya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi *****	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Pokja Kawasan Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata JAWA TENGAH
		3.26.02.1.03.0007			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi *****							0		200,000,000		150,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi *****	Lokasi	N/A	N/A	N/A	0	1	200,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Pokja Kawasan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
		3.26.02.1.03.0009			Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah							200,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

					Provinsi *****															- Bidang Destinasi Pariwisata	
						Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi *****	Dokumen	N/A	N/A	1	200,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	Pokja Kawasan Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata JAWA TENGAH
		3.26.02.1.03.0011			Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi *****							0		400,000,000		150,000,000		400,000,000		400,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Terlaksananya Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata *****	Kegiatan	N/A	N/A	N/A	0	2	400,000,000	1	150,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	Pokja Kawasan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata

		3.26.02.1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****							1.050,000,000		1,900,000,000		800,000,000		1,900,000,000		1,900,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Meningkatnya Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP/NIB	Usaha Pariwiata yang memiliki TDUP/NIB ****	Unit Usaha	315	200	350	1.050,000,000	200	1,900,000,000	200	800,000,000	200	1,900,000,000	200	1,900,000,000	Pokja Usaha Pariwisata	
		3.26.02.1.04.0009			Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) *****							200,000,000		500,000,000		300,000,000		500,000,000		500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	

						Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menegah Tinggi)	Jumlah Industri/ Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) *****	Unit Usaha	N/A	N/A	200	200,000,000	500	500,000,000	500	300,000,000	500	500,000,000	500	500,000,000	Pokja Usaha Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata KOTA SEMARANG
		3.26.02.1.04.0010			Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi *****							150,000,000		400,000,000		200,000,000		400,000,000		400,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Meningkatnya Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi *****	Laporan	N/A	N/A	1	150,000,000	2	400,000,000	1	200,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	Pokja Usaha Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata

		3.26.02.1.04.0013			Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata *****							200,000,000		1,000,000,000		300,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha *****	Laporan	326	263	300	200,000,000	100	1,000,000,000	300	300,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	Pokja Usaha Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA ***									7,008,609,000		17,000,000,000		7,673,953,000		15,036,681,000		13,996,550,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pemasaran Pariwisata	
						Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan ***	Orang	69480726	72342011	75348282	7,008,609,000	78522371	17,000,000,000	81827426	7,673,953,000	85275186	15,036,681,000	88740079	13,996,550,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan	

						n														Ekonomi Kreatif - Bidang Pemasaran Pariwisata	
		3.26.03.1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi ****								7,008,609,000		17,000,000,000		7,673,953,000		15,036,681,000		13,996,550,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pemasaran Pariwisata	
						Meningkatnya Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Jumlah tamu wisatawan mancanegara ****	Ribu Orang	99.58	66.81	70.79	7,008,609,000	74.76	17,000,000,000	78.74	7,673,953,000	82.77	15,036,681,000	86.69	13,996,550,000	Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata	
		3.26.03.1.01.0001			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar							1,258,609,000		4,500,000,000		1,500,000,000		3,500,000,000		3,500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pemas	

					Negeri *****															aran Pariwisata	
						Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri *****	Dokumen	3	3	3	1,258,609,000	3	4,500,000,000	3	1,500,000,000	3	3,500,000,000	3	3,500,000,000	Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata	Bidang Pemasaran Pariwisata KOTA SEMARANG
		3.26.03.1.01.0005			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata *****						750,000,000		3,000,000,000		1,000,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pemasaran Pariwisata	
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran	Dokumen	3	3	3	750,000,000	3	3,000,000,000	3	1,000,000,000	3	2,500,000,000	3	2,500,000,000	Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata	Bidang Pemasaran Pariwisata KOTA SEMARANG

							Pariwisata *****													
		3.26.03.1.01.0006			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri *****							5,000,000,000		9,500,000,000		5,173,953,000		9,036,681,000		7,996,550,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pemasaran Pariwisata	
						Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri *****	Kegiatan	30	30	30	5,000,000,000	53	9,500,000,000	50	5,173,953,000	50	9,036,681,000	50	7,996,550,000	Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata	Bidang Pemasaran Pariwisata KOTA SEMARANG
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ***									1,265,000,000		6,620,000,000		2,100,000,000		6,620,000,000		6,620,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	

						Meningkatnya SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi Kompetensi ***	%	20.58	29.41	20	1,265,000,000	20	6,620,000,000	20	2,100,000,000	20	6,620,000,000	20	6,620,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
		3.26.05.1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan ****								1,265,000,000		6,620,000,000		2,100,000,000		6,620,000,000		6,620,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Lanjutan	Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Lanjutan ****	Orang	70	100	150	1,265,000,000	150	6,620,000,000	150	2,100,000,000	150	6,620,000,000	150	6,620,000,000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan	

																			Pariwisata	
		3.26.05.1.01.0004			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata *****							250,000,000		375,000,000		250,000,000		500,000,000		500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata *****	Orang	70	150	150	250,000,000	150	375,000,000	150	250,000,000	200	500,000,000	200	500,000,000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
		3.26.05.1.01.0012			Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata *****							50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwis	

																			ata	
						Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) *****	Orang	N/A	N/A	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
		3.26.05.1.01.0014			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata *****							365,000,000		3,175,000,000		600,000,000		3,600,000,000		3,600,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata *****	Orang	70	70	150	365,000,000	500	3,175,000,000	150	600,000,000	620	3,600,000,000	620	3,600,000,000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata JAWA TENGAH

						pengembangan Pariwisata														
		3.26.05.1.01.0016			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI *****							500,000,000		1,520,000,000		1,000,000,000		1,520,000,000		1,520,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata	
						Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI *****	Orang	N/A	N/A	200	500,000,000	350	1,520,000,000	300	1,000,000,000	350	1,520,000,000	350	1,520,000,000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata JAWA TENGAH
		3.26.05.1.01.0018			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif *****							100,000,000		1,500,000,000		200,000,000		950,000,000		950,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi	

																			Pariwisata	
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif *****	Laporan	N/A	N/A	1	100,000,000	3	1,500,000,000	1	200,000,000	3	950,000,000	3	950,000,000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata JAWA TENGAH
	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif **										2,735,000,000		7,895,000,000		4,205,000,000		6,215,000,000		6,215,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
							Nilai Tambah Ekonomi Kreatif **	Juta Rupiah	66344495	84344465	10234465	2,735,000,000	12034465	7,895,000,000	13834465	4,205,000,000	15634465	6,215,000,000	17434465	6,215,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF								1,635,000,000		3,745,000,000		2,310,000,000		3,995,000,000		3,995,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

			MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ***																	- Bidang Ekonomi Kreatif	
						Meningkatnya Kabupaten/Kota yang Ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Jumlah Kabupaten/Kota yang DItetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) ***	Kabupaten/ Kota	1	1	1	1,635,000,000	1	3,745,000,000	1	2,310,000,000	1	3,995,000,000	1	3,995,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif ****								650,000,000		1,970,000,000		800,000,000		1,970,000,000		1,970,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
						Meningkatnya Kab/Kota Kreatif	Uji Petik PMK3I Kab/Kota ****	Dokumen	3	3	3	650,000,000	3	1,970,000,000	3	800,000,000	3	1,970,000,000	3	1,970,000,000	Pokja Kemitraan dan Pengembang	

																			an Infrastruktur Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif *****							150,000,000		470,000,000		300,000,000		470,000,000		470,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif *****	Laporan	N/A	N/A	1	150,000,000	3	470,000,000	2	300,000,000	3	470,000,000	3	470,000,000	Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
		3.26.04.1.01.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber							150,000,000		450,000,000		150,000,000		450,000,000		450,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi	

					Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar *****															Kreatif	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar *****	Laporan	N/A	N/A	1	150,000,000	3	450,000,000	1	150,000,000	3	450,000,000	3	450,000,000	Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
		3.26.04.1.01.0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula *****							150,000,000		450,000,000		150,000,000		450,000,000		450,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	

						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula *****	Laporan	N/A	N/A	1	150,000,000	3	450,000,000	1	150,000,000	3	450,000,000	3	450,000,000	Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
		3.26.04.1.01.0006			Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik *****							200,000,000		600,000,000		200,000,000		600,000,000		600,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
						Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik *****	Dokumen	N/A	N/A	2	200,000,000	6	600,000,000	2	200,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000	Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif

		3.26.04.1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif ****							985,000,000		1,775,000,000		1,510,000,000		2,025,000,000		2,025,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
						Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kualitasnya ****	Dokumen	N/A	N/A	1	985,000,000	1	1,775,000,000	1	1,510,000,000	1	2,025,000,000	1	2,025,000,000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.02.0010			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif *****						0		100,000,000		0		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	N/A	N/A	N/A	0	1	100,000,000	N/A	0	1	100,000,000	1	100,000,000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif

							*****														
		3.26.04.1.02.0012			Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah *****							125,000,000		125,000,000		125,000,000		125,000,000		125,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
						Tersediannya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah *****	Dokumen	N/A	1	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
		3.26.04.1.02.0013			Fasilitasi Kekayaan Intelektual *****							250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	

						Terlaksananya kegiatan konsultasi kekayaan intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual *****	Orang	120	100	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif
		3.26.04.1.02.0014			Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif *****							300,000,000		470,000,000		700,000,000		720,000,000		720,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
						Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif *****	Promosi	N/A	1	2	300,000,000	2	470,000,000	2	700,000,000	2	720,000,000	2	720,000,000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
		3.26.04.1.02.0015			Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah *****							210,000,000		230,000,000		335,000,000		230,000,000		230,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	

						Terlaksanya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga/ asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah *****	Lembaga	N/A	1	1	210,000,000	1	230,000,000	1	335,000,000	1	230,000,000	1	230,000,000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
		3.26.04.1.02.0017			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah *****							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
						Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
		3.26.04.1.02.0019			Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif *****							0		500,000,000		0		500,000,000		500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif -	

																			Bidang Ekonomi Kreatif	
						Tersediannya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	500,000,000	N/A	0	1	500,000,000	1	500,000,000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ***								1,100,000,000		4,150,000,000		1,895,000,000		2,220,000,000		2,220,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
						Meningkatnya SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi ***	%	7.16	4.33	16	1,100,000,000	16	4,150,000,000	16	1,895,000,000	16	2,220,000,000	16	2,220,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	

		3.26.05.1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan ****							300,000,000		2,230,000,000		300,000,000		550,000,000		550,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
						Meningkatnya Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan ****	Orang	100	200	600	300,000,000	600	2,230,000,000	600	300,000,000	600	550,000,000	600	550,000,000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	
		3.26.05.1.01.0008			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif *****							300,000,000		2,230,000,000		300,000,000		550,000,000		550,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	

						Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif *****	Laporan	N/A	1	1	300,000,000	1	2,230,000,000	1	300,000,000	1	550,000,000	1	550,000,000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
		3.26.05.1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif ****								800,000,000		1,920,000,000		1,595,000,000		1,670,000,000		1,670,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
						Meningkatnya Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif ****	Orang	250	360	1095	800,000,000	1095	1,920,000,000	1095	1,595,000,000	1095	1,670,000,000	1095	1,670,000,000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	
		3.26.05.1.02.0001			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif *****							300,000,000		600,000,000		400,000,000		600,000,000		600,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi	

																			Kreatif	
						Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif *****	Orang	N/A	200	300	300,000,000	600	600,000,000	400	400,000,000	600	600,000,000	600	600,000,000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
		3.26.05.1.02.0005			Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif *****							0		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
						Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi	Orang	N/A	N/A	N/A	0	15	120,000,000	15	120,000,000	15	120,000,000	15	120,000,000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif

							Kreatif *****														
		3.26.05.1.02.0007			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif *****							500,000,000		1,200,000,000		1,075,000,000		950,000,000		950,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif	
						Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif *****	Orang	N/A	160	200	500,000,000	480	1,200,000,000	430	1,075,000,000	380	950,000,000	380	950,000,000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan *												21,283,390,000		19,543,014,000		14,056,395,000		29,289,694,000		29,019,032,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
							Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) *	Angka	60.89	62.31	62.86		63.4		63.95		64.69		65.04		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan	

																			Ekonomi Kreatif	
	Meningkatnya Partisipasi Budaya **										21,283,390,000		19,543,014,000		14,056,395,000		29,289,694,000		29,019,032,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
							Angka Melek Budaya **	%	52.61	53.82	55.32	21,283,390,000	56.82	19,543,014,000	58.32	14,056,395,000	59.82	29,289,694,000	61.32	29,019,032,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ***								6,183,349,000		4,296,584,000		4,015,965,000		6,503,182,000		6,892,671,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan	
						Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional ***	%	22.09	24.1	26.1	6,183,349,000	28.11	4,296,584,000	30.12	4,015,965,000	32.13	6,503,182,000	34.14	6,892,671,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan	

																			Kebudayaan	
		2.22.02.1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****								6,183,349,000		4,296,584,000		4,015,965,000		6,503,182,000		6,892,671,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan	
						Meningkatnya pengelolaan kebudayaan	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan ****	%	6.67	8.48	10.3	6,183,349,000	12.12	4,296,584,000	13.94	4,015,965,000	15.76	6,503,182,000	17.58	6,892,671,000	Pokja Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	
		2.22.02.1.01.0010			Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan *****							6,183,349,000		4,296,584,000		4,015,965,000		6,503,182,000		6,892,671,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan	

																				Kebudayaan	
						Terlaksananya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi *****	Objek	11	14	17	6,183,349,000	20	4,296,584,000	23	4,015,965,000	26	6,503,182,000	29	6,892,671,000	Pokja Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH Bidang Pelindungan Kebudayaan
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ***									5,080,034,000		6,251,066,000		2,512,704,000		10,638,851,000		10,079,986,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
						Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan & pembinaan Objek Pemajuan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang berdayaguna ***	%	19.76	23.44	27.11	5,080,034,000	30.79	6,251,066,000	34.46	2,512,704,000	38.13	10,638,851,000	41.81	10,079,986,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang	

						Kebudayaan														Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
		2.22.02.1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****								5,080,034,000		6,251,066,000		2,512,704,000		10,638,851,000		10,079,986,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
						Meningkatnya pengelolaan kebudayaan	Jumlah SDM Kebudayaan memperoleh sertifikat dan penghargaan ****	Orang	N/A	7	14	960,034,000	24	1,291,811,000	34	579,229,000	44	2,198,568,000	54	2,876,844,000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
		2.22.02.1.01.0002			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata							1,920,068,000		2,583,622,000		1,158,458,000		4,397,136,000		5,753,688,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekono	

					Kebudayaan *****															mi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
						Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan *****	Orang	N/A	7	14	960,034,000	24	1,291,811,000	34	579,229,000	44	2,198,568,000	54	2,876,844,000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	35 kabupaten/Kota, JAWA TENGAH Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
						Meningkatnya pengelolaan kebudayaan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga/ kelompok kesenian ****	%	12.56	14.61	16.66	170,000,000	18.75	228,749,000	20.75	102,568,000	22.79	389,316,000	24.84	509,423,000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
		2.22.02.1.01.0002			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudaya							340,000,000		457,498,000		205,136,000		778,632,000		1,018,846,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi	

					an *****																Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
						Terlaksanya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga Kesenian yang Ditingkatkan Kapasitasnya *****	Lembaga	921	1071	1221	85,000,000	1371	114,374,000	1521	51,284,000	1671	194,658,000	1821	254,711,000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
						Terlaksanya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	jumlah satpendik (SMA/SMK/SLB) yang mengarusutamakan kebudayaan dan kearifan lokal *****	Unit	N/A	N/A	3	85,000,000	6	114,375,000	9	51,284,000	12	194,658,000	15	254,712,000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan

						Meningkatnya pengelolaan kebudayaan	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan ****	%	N/A	6.06	12.12	3,950,000,000	18.18	4,730,506,000	24.24	1,830,907,000	30.3	8,050,967,000	36.36	6,693,719,000	Pokja Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	
		2.22.02.1.01.0013			Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan *****							3,950,000,000		4,730,506,000		1,830,907,000		8,050,967,000		6,693,719,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
						Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/ Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan *****	Kegiatan	N/A	10	20	2,450,000,000	30	2,891,453,000	40	1,031,293,000	50	4,921,037,000	60	3,622,062,000	Pokja Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan

																					Kebudayaan
						Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah OPK yang dikembangkan *****	Angka	N/A	6	16	1,500,000,000	26	1,839,053,000	36	799,614,000	46	3,129,930,000	56	3,071,657,000	Pokja Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ***									2,600,000,000		2,600,000,000		2,600,000,000		2,600,000,000		2,600,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan	Persentase kesenian/tradisi budaya yang dilestarikan ***	%	N/A	N/A	72	2,600,000,000	76	2,600,000,000	80	2,600,000,000	84	2,600,000,000	88	2,600,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi	

						pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Taman Budaya Jawa Tengah														Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
		2.22.02.1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi ****								2,600,000,000		2,600,000,000		2,600,000,000		2,600,000,000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional	Persentase kesenian yang direvitalisasi dan dikembangkan ****	%	N/A	N/A	1.21	2,600,000,000	2.42	2,600,000,000	3.64	2,600,000,000	4.85	2,600,000,000	6.06	2,600,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		2.22.02.1.02.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya *****							2,600,000,000		2,600,000,000		2,600,000,000		2,600,000,000		2,600,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Buday	

																				a Jawa Tengah Kelas A	
						Terlaksanya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan *****	Objek	N/A	N/A	200	2,500,000,000	200	2,500,000,000	200	2,500,000,000	200	2,500,000,000	200	2,500,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
						Terlaksanya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kesenian yang di revitalisasi *****	Objek	N/A	N/A	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
						Terlaksanya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kesenian & tradisi budaya yang menjadi karya baru *****	Objek	N/A	N/A	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A

		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL ***								100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga Kesenian	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir ***	%	N/A	N/A	1.12	100,000,000	2.23	100,000,000	3.35	100,000,000	4.46	100,000,000	5.58	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
		2.22.03.1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota ****								100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	

						Meningkatnya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM & lembaga kesenian yang dilakukan pembinaan ****	%	N/A	N/A	0.14	100,000,000	0.28	100,000,000	0.42	100,000,000	0.56	100,000,000	0.7	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		2.22.03.1.01.0001			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional *****							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) *****	Orang	N/A	N/A	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A

		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH ***								700,007,000		611,238,000		454,722,000		925,152,000		980,562,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan	
						Meningkatnya pelindungan dan pengembangan tradisi dan kesejarahan	Persentase literasi kesejarahan dan tradisi ***	%	52.9	53.21	53.55	700,007,000	53.89	611,238,000	54.22	454,722,000	54.56	925,152,000	54.9	980,562,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan	
		2.22.04.1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi ****							700,007,000		611,238,000		454,722,000		925,152,000		980,562,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan	

						Meningkatnya pembinaan sejarah lokal	Jumlah literasi tradisi ****	Angka	313	315	317	700,007,000	319	611,238,000	321	454,722,000	323	925,152,000	325	980,562,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan	
		2.22.04.1.01.0004			Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal *****							700,007,000		611,238,000		454,722,000		925,152,000		980,562,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan	
						Terfasilitasinya Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal *****	Dokumen	3	5	7	700,007,000	9	611,238,000	11	454,722,000	13	925,152,000	15	980,562,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH Bidang Pelindungan Kebudayaan

		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA ***								1,950,000,000		1,702,306,000		1,266,405,000		2,576,560,000		2,730,876,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan	
						Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional ***	%	13.16	13.16	13.6	1,950,000,000	14.04	1,702,306,000	14.47	1,266,405,000	14.91	2,576,560,000	15.35	2,730,876,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan	
		2.22.05.1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi ****								1,050,000,000		916,626,000		681,911,000		1,387,378,000		1,470,472,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan	
						Meningkatnya penetapan Cagar	Persentase Cagar Budaya berpering	%	7.89	8.77	9.65	1,050,000,000	10.53	916,626,000	11.4	681,911,000	12.28	1,387,378,000	13.16	1,470,472,000	Pokja Pelindungan Cagar	

						Budaya Peringkat Provinsi	kat provinsi ****													Buday a	
		2.22.0 5.1.01. 0002			Penetapan Cagar Budaya *****							1,050 ,000, 000		916,6 26,00 0		681,9 11,00 0		1,387 ,378, 000		1,470 ,472, 000	Dinas Kebud ayaan, Pariwis ata dan Ekono mi Kreatif - Bidang Pelind ungan Kebud ayaan	
						Terlaksan anya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapka n *****	Objek	242	252	262	1,050 ,000, 000	272	916,6 26,00 0	282	681,9 11,00 0	292	1,387 ,378, 000	302	1,470 ,472, 000	Pokja Pelind ungan Cagar Buday a	35 Kabupa ten/Kot a, JAWA TENGA H B idang Pelindu ngan Kebuda yaan
		2.22.0 5.1.02		Pengel olaan Cagar Buday a Pering kat Provin si ****								900,0 00,00 0		785,6 80,00 0		584,4 94,00 0		1,189 ,182, 000		1,260 ,404, 000	Dinas Kebud ayaan, Pariwis ata dan Ekono mi Kreatif - Bidang Pelind ungan Kebud ayaan	

						Meningkatnya pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya berperingkat provinsi yang dilindungi ****	%	31.25	37.5	43.75	900,000,000	50	785,680,000	56.25	584,494,000	62.5	1,189,182,000	68.75	1,260,404,000	Pokja Pelindungan Cagar Budaya	
		2.22.05.1.02.0001			Pelindungan Cagar Budaya *****							900,000,000		785,680,000		584,494,000		1,189,182,000		1,260,404,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan	
						Terlaksananya Cagar Budaya yang Diregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi *****	Objek	271	278	285	900,000,000	292	785,680,000	299	584,494,000	306	1,189,182,000	313	1,260,404,000	Pokja Pelindungan Cagar Budaya	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH Bidang Pelindungan Kebudayaan
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA ***									1,170,000,000		1,508,648,000		650,330,000		2,567,608,000		2,880,591,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembang	

																				an, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
						Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya berdayaguna ***	%	12.81	14.46	16.12	1,170,000,000	17.77	1,508,648,000	19.42	650,330,000	21.07	2,567,608,000	22.73	2,880,591,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
		2.22.05.1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi ****								1,170,000,000		1,508,648,000		650,330,000		2,567,608,000		2,880,591,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebud	

																			ayaan	
						Meningkatnya pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya berperingkat provinsi yg dimanfaatkan ****	Angka	9	11	13	570,000,000	15	701,295,000	17	288,325,000	19	1,193,553,000	21	1,082,627,000	Pokja Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan	
		2.22.05.1.02.0002			Pengembangan Cagar Budaya *****							390,000,000		488,862,000		212,556,000		832,007,000		816,516,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
						Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan *****	Objek	9	13	17	390,000,000	21	488,862,000	25	212,556,000	29	832,007,000	33	816,516,000	Pokja Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan

																				Pembinaan Kebudayaan
		2.22.05.1.02.0003			Pemanfaatan Cagar Budaya *****							180,000,000		212,433,000		75,769,000		361,546,000		266,111,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
						Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan *****	Objek	22	27	32	180,000,000	37	212,433,000	42	75,769,000	47	361,546,000	52	266,111,000	Pokja Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
						Meningkatnya pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah SDM Cagar Budaya memperol	Orang	210	217	224	600,000,000	231	807,353,000	238	362,005,000	245	1,374,055,000	252	1,797,964,000	Pokja Pembinaan SDM, Lemba	

							eh sertifikat dan pengharg aan ****													ga dan Pranat a Kebud ayaan	
		2.22.0 5.1.02. 0004			Pembinaa n dan Peningkat an Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya *****							600,0 00,00 0		807,3 53,00 0		362,0 05,00 0		1,374 ,055, 000		1,797 ,964, 000	Dinas Kebud ayaan, Pariwis ata dan Ekono mi Kreatif - Bidang Penge mbang an, Peman faatan dan Pembi naan Kebud ayaan	
						Terlaksan anya Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatk an Kapasitas nya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkat kan Kapasitas nya *****	Orang	N/A	35	70	600,0 00,00 0	105	807,3 53,00 0	140	362,0 05,00 0	175	1,374 ,055, 000	210	1,797 ,964, 000	Pokja Pembi naan SDM, Lemba ga dan Pranat a Kebud ayaan	35 Kabupa ten/Kot a, JAWA TENGA H B idang Pengem bangan, Pemanf aatan dan Pembin aan Kebuda yaan
		2.22.0 6	PROG RAM PENG ELOLA AN PERM									3,500 ,000, 000		2,473 ,172, 000		2,456 ,269, 000		3,378 ,341, 000		2,754 ,346, 000	Dinas Kebud ayaan, Pariwis ata dan	

			USEUMAN ***																Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Meningkatnya Tata Kelola Layanan Museum	Indeks Kepuasan Masyarakat ***	%	90.08	90.09	90.1	3,500,000,000	90.12	2,473,172,000	90.13	2,456,269,000	90.15	3,378,341,000	90.16	2,754,346,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
		2.22.06.1.01		Pengelolaan Museum Provinsi ****								3,500,000,000		2,473,172,000		2,456,269,000		3,378,341,000		2,754,346,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	

						Meningkatnya pengelolaan museum	Jumlah pengunjung museum ****	Orang	95558	57500	60000	3,500,000,000	62500	2,473,172,000	65000	2,456,269,000	67500	3,378,341,000	70000	2,754,346,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		2.22.06.1.01.0001			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu *****							1,000,000,000		850,000,000		825,000,000		1,000,000,000		900,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan *****	Unit	2172	2000	2020	1,000,000,000	2000	850,000,000	2000	825,000,000	2035	1,000,000,000	2000	900,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
		2.22.06.1.01.0003			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum *****							1,950,000,000		1,223,172,000		1,231,269,000		1,978,341,000		1,454,346,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa	

																				Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum *****	Unit	7	7	7	1,950,000,000	6	1,223,172,000	6	1,231,269,000	7	1,978,341,000	6	1,454,346,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
		2.22.06.1.01.0004			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum *****							550,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia *****	Unit	4	4	4	550,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A

Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif *												40,506,140,000		38,902,810,000		37,463,780,000		40,436,020,000		39,961,584,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif *	Angka	N/A	N/A	81.55		82.05		82.55		83.05		83.55		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif **											850,000,000		850,000,000		850,000,000		850,000,000		850,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif **	Angka	N/A	3.02	3.03	850,000,000	3.04	850,000,000	3.05	850,000,000	3.06	850,000,000	3.07	850,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									850,000,000		850,000,000		850,000,000		850,000,000		850,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

			PROVINSI ***																	
						Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ***	%	N/A	N/A	100	850,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								850,000,000		850,000,000		850,000,000		850,000,000		850,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundan	%	N/A	N/A	100	850,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	

							gan ****														
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Terlaksanaanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	N/A	N/A	3	350,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/A	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kebudayaa											39,656,140,000		38,052,810,000		36,613,780,000		39,586,020,000		39,111,584,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

	n, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif **																			
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif **	Angka	N/A	N/A	77	39,656,140,000	78	38,052,810,000	79	36,613,780,000	80	39,586,020,000	81	39,111,584,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									28,856,138,000		28,856,138,000		28,856,138,000		28,856,138,000		28,856,138,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan	%	N/A	N/A	86	28,856,138,000	87	28,856,138,000	88	28,856,138,000	89	28,856,138,000	90	28,856,138,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

						dan Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif ***													
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								18,904,117,000		18,904,117,000		18,904,117,000		18,904,117,000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	N/A	12	18,904,117,000	12	18,904,117,000	12	18,904,117,000	12	18,904,117,000	12	18,904,117,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							18,104,117,000		18,104,117,000		18,104,117,000		18,104,117,000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	N/A	N/A	170	18,104,117,000	170	18,104,117,000	170	18,104,117,000	170	18,104,117,000	170	18,104,117,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	N/A	12	800,000,000	12	800,000,000	12	800,000,000	12	800,000,000	12	800,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								345,000,000		345,000,000		345,000,000		345,000,000		345,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	N/A	12	345,000,000	12	345,000,000	12	345,000,000	12	345,000,000	12	345,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							345,000,000		345,000,000		345,000,000		345,000,000		345,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata	

					*****														dan Ekonomi Kreatif	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	1	345,000,000	1	345,000,000	1	345,000,000	1	345,000,000	1	345,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	N/A	N/A	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

					Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	N/A	170	0	170	0	170	0	170	0	170	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Terlaksanannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	N/A	N/A	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	N/A	N/A	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

							*****													
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	N/A	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							2,010,000,000		2,010,000,000		2,010,000,000		2,010,000,000		2,010,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar	%	N/A	N/A	100	2,010,000,000	100	2,010,000,000	100	2,010,000,000	100	2,010,000,000	100	2,010,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

							layanan ****														
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							160,000,000		160,000,000		160,000,000		160,000,000		160,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	12	160,000,000	12	160,000,000	12	160,000,000	12	160,000,000	12	160,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand	Paket	N/A	N/A	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEG	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonom

							aan yang Disediakan *****												AWAIAN	i Kreatif
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							270,000,000		270,000,000		270,000,000		270,000,000		270,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	N/A	12	270,000,000	12	270,000,000	12	270,000,000	12	270,000,000	12	270,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan							1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata	

					Konsultasi SKPD *****															dan Ekonomi Kreatif	
						Terlaksanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Terlaksanya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

						Terlaksanany a Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								327,021,000		327,021,000		327,021,000		327,021,000		327,021,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	N/A	3	327,021,000	3	327,021,000	7	327,021,000	7	327,021,000	7	327,021,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekono	

					Kendaraan Dinas Jabatan *****														mi Kreatif	
						Tersediannya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	0	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	1	0	1	0	1	0	1	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							327,021,000		327,021,000		327,021,000		327,021,000		327,021,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

						Tersediaan ya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	25	327,021,000	25	327,021,000	25	327,021,000	25	327,021,000	25	327,021,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersediaan ya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	1	0	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								5,370,000,000		5,370,000,000		5,370,000,000		5,370,000,000		5,370,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Laporan	N/A	N/A	12	5,370,000,000	12	5,370,000,000	12	5,370,000,000	12	5,370,000,000	12	5,370,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

							daerah yang disusun ****													
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							1,240,000,000		1,240,000,000		1,240,000,000		1,240,000,000		1,240,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	1,240,000,000	12	1,240,000,000	12	1,240,000,000	12	1,240,000,000	12	1,240,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwis	

					Perlengkapan Kantor *****															ata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							4,000,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	12	4,000,000,000	12	4,000,000,000	12	4,000,000,000	12	4,000,000,000	12	4,000,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer								1,600,000,000		1,600,000,000		1,600,000,000		1,600,000,000		1,600,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

				intahan Daerah ****																
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	N/A	26	1,600,000,000	26	1,600,000,000	26	1,600,000,000	26	1,600,000,000	26	1,600,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharaa dan	Unit	N/A	N/A	7	100,000,000	7	100,000,000	7	100,000,000	7	100,000,000	7	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

						atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya *****													
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharaa dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	19	200,000,000	19	200,000,000	19	200,000,000	19	200,000,000	19	200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipeliharaa *****	Unit	N/A	N/A	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan

																			KEPEGAWAIAN	Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	315	200,000,000	315	200,000,000	315	200,000,000	315	200,000,000	315	200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi	

					Kantor atau Bangunan Lainnya *****														Kreatif	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								6,474,672,000		4,484,922,000		3,735,142,000		5,704,112,000		5,154,896,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	6,474,672,000	100	4,484,922,000	100	3,735,142,000	100	5,704,112,000	100	5,154,896,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

						daerah di Taman Budaya Jawa Tengah	Taman Budaya Jawa Tengah ***												- Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa	

																				Tengah Kelas A	
						Terlaksanya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	4	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								605,000,000		615,000,000		630,000,000		640,000,000		650,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	605,000,000	100	615,000,000	100	630,000,000	100	640,000,000	100	650,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan							80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekono	

					Kantor *****															mi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							85,000,000		85,000,000		85,000,000		85,000,000		85,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	2	2	2	85,000,000	2	85,000,000	2	85,000,000	2	85,000,000	2	85,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	2	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	2	2	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan	Dokumen	4	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

							g-Undangan yang Disediakan *****													
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							70,000,000		70,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	12	70,000,000	12	70,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							200,000,000		210,000,000		220,000,000		230,000,000		240,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	

						Terlaksanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	12	12	200,000,000	12	210,000,000	12	220,000,000	12	230,000,000	12	240,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								809,672,000		709,922,000		100,000,000		1,904,112,000		1,144,896,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	9	31	809,672,000	32	709,922,000	35	100,000,000	35	1,904,112,000	35	1,144,896,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif -	

																			Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
					Tersediaan ya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
					Tersediaan ya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Buday	

																			a Jawa Tengah Kelas A	
						Tersediany a Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/ A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersediany a Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/ A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							150,000,000		350,000,000		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah	

																				Kelas A	
						Tersediaan ya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	N/A	1	150,000,000	2	350,000,000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							559,672,000		259,922,000		0		1,804,112,000		1,044,896,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersediaan ya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	9	10	10	559,672,000	15	259,922,000	N/A	0	15	1,804,112,000	15	1,044,896,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								2,220,000,000		2,220,000,000		2,220,000,000		2,220,000,000		2,220,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	

						Tersediaan ya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	12	2,220,000,000	12	2,220,000,000	12	2,220,000,000	12	2,220,000,000	12	2,220,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Terlaksanany a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							700,000,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa	

																			Tengah Kelas A	
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	700,000,000	4	700,000,000	4	700,000,000	4	700,000,000	4	700,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	7	7	7	1,500,000,000	7	1,500,000,000	7	1,500,000,000	7	1,500,000,000	7	1,500,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								2,790,000,000		890,000,000		735,142,000		890,000,000		1,090,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik	Jumlah unit barang milik daerah penunjan	Unit	N/A	110	117	2,790,000,000	115	890,000,000	116	735,142,000	115	890,000,000	116	1,090,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

						daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	g urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****														
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							140,000,000		140,000,000		140,000,000		140,000,000		140,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	14	7	7	140,000,000	7	140,000,000	7	140,000,000	7	140,000,000	7	140,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif -	

																			Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Terlaksanya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah	

																			Kelas A	
					Terlaksanya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
					Terlaksanya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A

		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							2,500,000,000		600,000,000		445,142,000		600,000,000		800,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Terlaksanaanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharaa/Direhabilitasi *****	Unit	3	6	5	2,500,000,000	3	600,000,000	4	445,142,000	3	600,000,000	4	800,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	

						Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	98	93	105	150,000,000	105	150,000,000	105	150,000,000	105	150,000,000	105	150,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
						Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								4,325,330,000		4,711,750,000		4,022,500,000		5,025,770,000		5,100,550,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita ***	%	100	100	100	4,325,330,000	100	4,711,750,000	100	4,022,500,000	100	5,025,770,000	100	5,100,550,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****							40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa	

																				Tengah Rangga rwarsit a Kelas A	
						Meningkat nya layanan administr asi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administr asi barang milik daerah pada perangka t daerah ****	Doku men	1	1	1	40,00 0,000	1	40,00 0,000	1	40,00 0,000	1	40,00 0,000	1	40,00 0,000	SUB BAGIA N TATA USAHA	
		X.XX.0 1.1.03. 0002			Pengaman an Barang Milik Daerah SKPD *****							40,00 0,000		40,00 0,000		40,00 0,000		40,00 0,000		40,00 0,000	Dinas Kebud ayaan, Pariwis ata dan Ekono mi Kreatif - Museu m Jawa Tengah Rangga rwarsit a Kelas A	
						Terlaksan anya Pengaman an Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengama nan Barang Milik Daerah SKPD *****	Doku men	1	1	1	40,00 0,000	1	40,00 0,000	1	40,00 0,000	1	40,00 0,000	1	40,00 0,000	SUB BAGIA N TATA USAHA	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							403,371,000		413,000,000		413,000,000		413,000,000		413,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	403,371,000	100	413,000,000	100	413,000,000	100	413,000,000	100	413,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							40,371,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	

						Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	2	40,371,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							125,000,000		125,000,000		125,000,000		125,000,000		125,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	3	2	2	125,000,000	2	125,000,000	2	125,000,000	2	125,000,000	2	125,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi	

																					Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							31,000,000		31,000,000		31,000,000		31,000,000		31,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	2	2	2	31,000,000	2	31,000,000	2	31,000,000	2	31,000,000	2	31,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****							5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	

						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	2	2	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							12,000,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum	

																				Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								445,959,000		558,750,000		219,500,000		495,959,000		545,959,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	10	10	10	445,959,000	8	558,750,000	6	219,500,000	7	495,959,000	8	545,959,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							200,000,000		300,000,000		150,000,000		250,000,000		300,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	5	5	5	200,000,000	6	300,000,000	4	150,000,000	5	250,000,000	6	300,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

							Disediakan *****													
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersediannya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum	

																			Jawa Tengah Rangga rwarsit a Kelas A	
						Tersedian ya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediaka n *****	Unit	N/A	N/ A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIA N TATA USAHA	Dinas Kebuda yaan, Pariwis ata dan Ekonom i Kreatif - Museu m Jawa Tengah Ranggar warsita Kelas A
		X.XX.0 1.1.07. 0009			Pengadaa n Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebud ayaan, Pariwis ata dan Ekono mi Kreatif - Museu m Jawa Tengah Rangga rwarsit a Kelas A	
						Tersedian ya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Disediaka n *****	Unit	N/A	N/ A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIA N TATA USAHA	Dinas Kebuda yaan, Pariwis ata dan Ekonom i Kreatif - Museu m Jawa Tengah

																				Ranggarwarsita Kelas A
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							225,959,000		238,750,000		49,500,000		225,959,000		225,959,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museu	

																				m Jawa Tengah Rangga rwarsit a Kelas A	
						Tersedian ya Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya yang Disediaka n *****	Unit	1	2	1	225,9 59,00 0	1	238,7 50,00 0	1	49,50 0,000	1	225,9 59,00 0	1	225,9 59,00 0	SUB BAGIA N TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.0 1.1.08		Penye diaan Jasa Penun jang Urusa n Pemer intaha n Daera h ****								2,355 ,000, 000		2,355 ,000, 000		2,355 ,000, 000		2,605 ,000, 000		2,655 ,000, 000	Dinas Kebud ayaan, Pariwis ata dan Ekono mi Kreatif - Museu m Jawa Tengah Rangga rwarsit a Kelas A	
						Tersedian ya jasa penunjan g urusan pemerinta han daerah	Jumlah laporan penyedia an jasa penunjan g urusan pemerint	Lapor an	4	4	4	2,355 ,000, 000	4	2,355 ,000, 000	4	2,355 ,000, 000	4	2,605 ,000, 000	4	2,655 ,000, 000	SUB BAGIA N TATA USAHA	

						sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	ahan daerah yang disusun ****														
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							760,000,000		760,000,000		760,000,000		860,000,000		860,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	

						Tersediaan ya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	760,000,000	4	760,000,000	4	760,000,000	4	860,000,000	4	860,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersediaan ya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							1,550,000,000		1,550,000,000		1,550,000,000		1,700,000,000		1,750,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan	

																				Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersediaya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	4	4	4	1,550,000,000	4	1,550,000,000	4	1,550,000,000	4	1,700,000,000	4	1,750,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								1,081,000,000		1,345,000,000		995,000,000		1,471,811,000		1,446,591,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersediaya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Unit	28	28	27	1,081,000,000	26	1,345,000,000	23	995,000,000	28	1,471,811,000	25	1,446,591,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

						pemerintahan daerah	daerah yang dilakukan pemeliharaan ****														
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							19,000,000		19,000,000		19,000,000		19,000,000		19,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	3	3	3	19,000,000	3	19,000,000	3	19,000,000	3	19,000,000	3	19,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museu	

																				m Jawa Tengah Rangga rwarsit a Kelas A	
						Terlaksan anya Pemelihar aan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihar a *****	Unit	2	2	2	20,00 0,000	2	20,00 0,000	2	20,00 0,000	2	20,00 0,000	2	20,00 0,000	SUB BAGIA N TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.0 1.1.09. 0006			Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							120,0 00,00 0		120,0 00,00 0		120,0 00,00 0		120,0 00,00 0		120,0 00,00 0	Dinas Kebud ayaan, Pariwis ata dan Ekono mi Kreatif - Museu m Jawa Tengah Rangga rwarsit a Kelas A	
						Terlaksan anya Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar a *****	Unit	8	8	8	120,0 00,00 0	8	120,0 00,00 0	8	120,0 00,00 0	8	120,0 00,00 0	8	120,0 00,00 0	SUB BAGIA N TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.0 1.1.09. 0007			Pemelihar aan Aset Tetap Lainnya *****							36,00 0,000		36,00 0,000		36,00 0,000		36,00 0,000		36,00 0,000	Dinas Kebud ayaan, Pariwis ata dan Ekono mi Kreatif - Museu	

																				m Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipeliharaa *****	Unit	2	3	3	36,000,000	3	36,000,000	3	36,000,000	3	36,000,000	3	36,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****							0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Terlaksanaanya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipeliharaa *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****							700,000,000		900,000,000		600,000,000		1,000,000,000		1,001,591,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museu	

																				m Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharaa/Direhabilitasi *****	Unit	6	6	5	700,000,000	5	900,000,000	5	600,000,000	7	1,000,000,000	6	1,001,591,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****								100,000,000		150,000,000		100,000,000		150,000,000		150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihar	Unit	3	4	2	100,000,000	3	150,000,000	2	100,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

						Lainnya	a/Direhabilitasi *****														
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							86,000,000		100,000,000		100,000,000		126,811,000		100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharaa/Direhabilitasi *****	Unit	2	2	2	86,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	126,811,000	2	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tabel 4.2
Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	Pengembangan kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap kesejahteraan budayawan lokal	1. Pemanfaatan warisan Budaya di locus Cagar Budaya 2. Ruang Ekspresi Budaya di Masyarakat 3. Apresiasi Insan Kebudayaan 4. Apresiasi Pelestari Cagar Budaya	1. 5 Event di locus Cagar Budaya 2. 5 Festival 3.Insan Kebudayaan 4 orang 4. Pelestari Cagar Budaya 4 orang	Program Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pengelolaan bud yg masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 provinsi dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi.	Bidang Pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Biro Kesra, Dinas Kominfo, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
2	Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan	• Diplomasi Budaya antar Negara	Pengiriman duta seni antar negara	Program Pengembangan Kebudayaan kegiatan Pengelolaan bud yg masyarakat pelakunya lintas daerah	Bidang Pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

	Diaspora			Kabupaten/Kota dalam 1 provinsi		Setda, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Mengusulkan lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke USESCO	Festival Lir ilir, Fasilitasi Warisan Budaya Dunia	2 kegiatan festival	Program Pengembangan Kebudayaan Pengelolaan bud yg masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 provinsi	Bidang Pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Dinas Kominfo, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil.
4	Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	• Review regulasi penggunaan Bahasa daerah di Jawa Tengah	1 kegiatan	Program Pengembangan Kebudayaan Pengelolaan bud yg masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 provinsi	Bidang Pelindungan Kebudayaan	Biro Hukum Setda, Biro Organisasi Setda, Satpol PP
5. a.	Pembentukan Kecamatan Berdaya Melalui : Pemberdayaan ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif	• Penyusunan Data Base Pelaku Ekonomi Kreatif • Pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif pada 17 Sub Sektor Ekraf • Fasilitasi sertifikasi Pelaku Ekraf	1095 Orang	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		• Pengembanan infrastruktur ruang fisik, sarana fisik,	5 Event	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana KaTa Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian dan

		teknologi, informasi, dan komunikasi (Creative Hub) • Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan sampai ke Desa				Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kominfo
		• Penyusunan Kajian Management Strategis Pengembangan Ekraf • Fasilitasi pelindungan, komersialisasi, konsultasi, dan advokasi kekayaan intelektual • Bimbingan teknis dan supervisi kreativitas pada Sub Sektor Ekraf • Fasilitasi Promosi dan Distribusi Produk Ekraf	5 Dokumen 500 Orang 5 Lembaga 10 Promosi	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6.	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	1. Pengembangan Sarpras Pariwisata (Bankeu) 2. Pengembangan Produk dan Event Pariwisata 3. Peningkatan pengelolaan Desa Wisata	15 Lokasi 8 Lokasi	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Bidang Destinasi Pariwisata	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

		4. Pendampingan pembentukan Desa/Kampung Wisata baru, termasuk untuk Desa Dampingan OPD 5. Pengembangan Paket Wisata yang terintegrasi antar desa 6. Pendampingan KKN Tematik	3.060 Orang			
		7. Pelatihan kewirausahaan bagi pengelola dan masyarakat di desa wisata 8. Aktualisasi sadar wisata dan sapta pesona bagi masyarkat desa	750 Orang 2040 Orang	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja
7.	Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah : **Pengembangan wisata alam :** Dieng – Wonosobo Geopark Karangsambung – Kebumen	1. Pelatihan Konten Kreator kepada Pengelola Desa Wisata 2. Pendampingan pembuatan konten pada Medsos milik Desa Wisata		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Kominfo

	Pengembangan wisata budaya : Rambut Gimbal – Dieng Desa Ada Banokeling – Banyumas **Pengembangan wisata religi :** Kyai Soleh Darat - Kota Semarang Sunan Kalijaga - Demak Sunan Muria – Kudus Klenteng Liong Hok Bio – Magelang Gereja Salib Putih – Salatiga Prambanan & Borobudur – Magelang					
		3. Pelatihan pengelolaan manajemen DTW 4. Tata Kelola Masyarakat pada DTW 5. Inovasi Produk/Atraksi Wisata	10 Lokasi	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Bidang Destinasi Pariwisata	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		6. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 7. Fasilitasi TDUP Usaha Pariwisata 8. Pengembangan	1000 Unit Usaha	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		Paket Wisata 10. Penyusunan peta investasi pariwisata Jawa Tengah				
		11. Pengembangan Paket Wisata 12. Wisata Pengenalan (Fam Trip) kepada Pelaku Pariwisata dari Dalam dan Luar Negeri 13. Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri, termasuk Travel Fair dan B to B 14. Penyediaan materi Promosi dan informasi pariwisata melalui media, cetak, elektronik dan digital 15. Fasilitasi Event Pariwisata	15 Dokumen	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Bidang Pemasaran Pariwisata	Dinas Kominfo
		15. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata	850 Orang Tersertifikasi	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi	Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		(Kepemanduan) 16. Pelatihan kewirausahaan bagi pengelola dan masyarakat di sekitar DTW 17. Aktualisasi sadar wisata dan sapta pesona bagi masyarakat		Kreatif Tingkat Lanjutan		
8.	Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening : - Pengembangan Kawasan Borobudur - Pengembangan Kawasan Kopeng - Pengembangan Kawasan Rawa Pening	1. Pengembangan Paket Wisata 2. Wisata Pengenalan (Fam Trip) kepada Pelaku Pariwisata dari Dalam dan Luar Negeri 3. Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri, termasuk Travel Fair dan B to B 4. Penyediaan materi Promosi dan informasi pariwisata melalui media, cetak, elektronik dan digital 5. Fasilitasi Event Pariwisata 6. Borobudur Jazz Festival	2 Lokasi	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Bidang Pemasaran Pariwisata	Dinas Kominfo
		7. Penyusunan	3 Dokumen	Kegiatan Pengelolaan	Bidang	BAPPEDA dan

		dokumen perencanaan pengembangan kawasan Borobudur 8. Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kawasan Kopeng 9. Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kawasan Rawa Pening		Destinasi Pariwisata Provinsi	Destinasi Pariwisata	BRIDA
		10. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi di kawasan Borobudur 11. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi di kawasan Kopeng 12. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi di kawasan Rawa Pening	600 Orang	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.	Event olahraga memancing terbesar di	Penyelenggaraan Event Sport dan Tourism :		Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik	Bidang Pemasaran	Dinas Kominfo

	Asia	- Event Mancing Karimunjawa - Sunset Jazz Karimunjawa	53 Event	Dalam dan Luar Negeri	Pariwisata	
10.	Mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan KEK Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen)	2 Dokumen	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi di kawasan KEK Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen)	300 Orang	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Fasilitasi Event pada kawasan KEK Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen)	2 Event	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Bidang Pemasaran Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	1. Pelatihan Konten Kreator kepada Pengelola Desa Wisata 2. Pendampingan	3000 Orang	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Kominfo

		pembuatan konten pada Medsos milik Desa Wisata	5 Laporan			
12.	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	1. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata berbasis wisata muslim 2. Roadmap pengembangan pariwisata ramah muslim	150 Usaha 1 Dokumen	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja sasaran menjadi upaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi. Indikator kinerja tersebut diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dicapai bila sumber daya organisasi dan asumsi – asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator dinas akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang diproyeksikan setiap tahunnya sebagaimana pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja RPJMD
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
TUJUAN											
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60,89	60,89	62,31	62,86	63,40	63,95	64,69	65,04	65,04
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,4	3,56	3,50	3,60	3,72	3,84	3,94	4,04	4,04
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDR Ekonomi Kreatif Nasional	%	N/A	N/A	12,61	13,08	13,54	14,01	14,47	14,26	14,26
SASARAN											
1	Angka Melek Budaya	Angka	50,94	52,61	53,82	55,32	56,82	58,32	59,82	61,32	61,32
5	Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	7.520.862	7.858.616	7.642.320	8.243.954	8.645.697	8.798.697	8.957.262	9.121.890	9.121.890
6	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Juta Rupiah	N/A	66.344.465	84.344.465	102.344.465	120.344.465	138.344.465	156.344.465	174.344.465	174.344.465

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal Kinerja			Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja RPJMD
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	3,4	3,56	3,50	3,60	3,72	3,84	3,94	4,04	4,04
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang)	%	37.08	9.43	-32.91	5.69	5.61	5.32	5.12	4.74	8
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	N/A	N/A	12,61	13,08	13,54	14,01	14,47	14,26	14,26
4	Presentase pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal Kinerja			Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja RPJMD
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Presentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	N/A	6,67	8,48	10,30	12,12	13,94	15,76	17,58	17,58
2	Presentase Jumlah Cagar Budaya yang didaftarkan	%	12,19	19,39	22,31	24,09	25,87	27,66	29,44	31,22	31,22
3	Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	Angka	N/A	210	224	238	255	272	289	306	306

Tabel 4.4
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Satuan	Kondisi Awal Kinerja			Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja RPJMD
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	N/A	79,31	80,41	81,55	82,05	82,55	83,05	83,55	83,55
2	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	N/A	3,01	3,02	3,03	3.04	3.05	3,06	3,07	3,07
3	Indeks kepuasan masyarakat Perangkat Daerah	Angka	N/A	75	76	77	78	79	80	81	81

BAB V
PENUTUP

Rencana strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, yang akan menjadi panduan penyelenggaraan pembangunan bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, khususnya yang terkait dan fokus pada urusan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terdapat substansi penting yang perlu mendapatkan perhatian guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu dalam pemajuan kebudayaan serta peningkatan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa dilihat dari peningkatan peran serta masyarakat secara sadar dan nyata telah melibatkan diri dalam aksi pemanfaatan warisan budaya serta perwujudan pengembangan ekonomi desa yang produktif berbasis potensi unggulan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Pada sisi konsistensi, maka Rencana strategis harus mampu menjadi instrument utama dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, kemudian pada sisi keberlanjutan harus mampu mencerminkan gambaran tahapan setiap upaya pencapaian tujuan, dan fokus/prioritas menggambarkan orientasi perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan harus terkonsentrasi pada upaya penyelesaian permasalahan yang telah teridentifikasi dan terpetakan, sedangkan kepekaan terhadap perubahan lingkungan strategis maupun terhadap perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika lingkungan global dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pembangunan bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan tersebut, serta harus mampu menangkap dan memanfaatkan setiap peluang yang tercipta akibat dari adanya perubahan.

Dipahami pula bahwa dalam kerangka penyelenggaraan program/kegiatan terdapat faktor penting yang akan sangat memberikan dampak terhadap pencapaian target kinerja. Faktor ini adalah ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan selaras dengan target kinerja. Kondisi yang

mungkin terjadi adalah tidak terpenuhinya anggaran akibat ketersediaan anggaran yang terbatas atau belum sesuai dengan perencanaan awal. Pada kondisi ini, maka hal yang patut menjadi perhatian adalah penetapan distribusi anggaran secara cermat dan tepat sesuai target utama/prioritas yang berdampak langsung terhadap layanan publik yang disertai dengan upaya pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien, serta dengan menggali dan mengarahkan setiap sumber daya yang dimungkinkan untuk mendorong pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan dukungan, partisipasi, kesungguhan/komitmen, dan tanggungjawab bersama dari seluruh pihak dan komponen masyarakat, yang disertai kesadaran bahwa pemahaman terhadap layanan penyelenggaraan pembangunan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi bagian kerja bersama untuk mencapa tujuan yang telah ditetapkan.

Semarang, September 2025

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
PROVINSI JAWA TENGAH

.....

Pohon Kinerja Urusan Pariwisata :

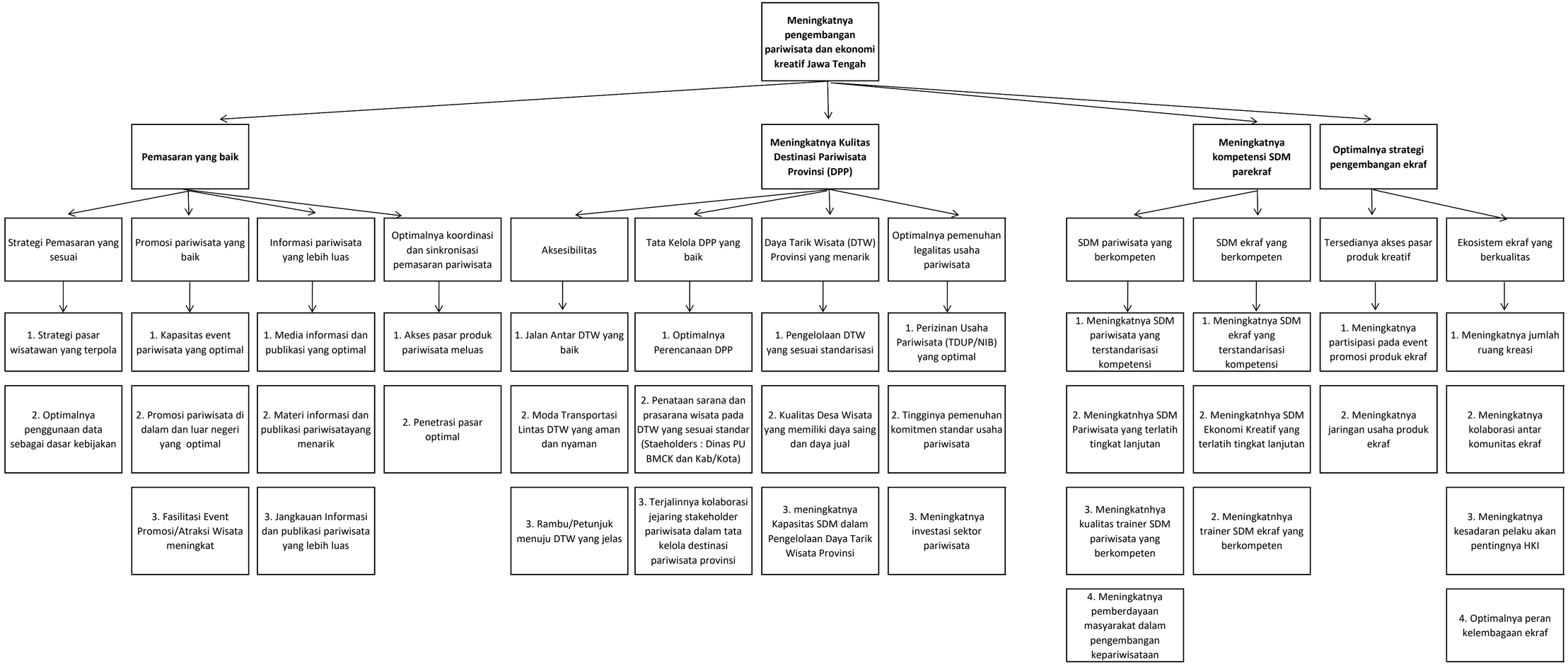

Meningkatkan kualitas SDM Jawa Tengah
IK: Indeks Modal Manusia (IMM)

Meningkatnya identitas jatidiri dan karakter masyarakat Jateng
IK: IPK

Meningkatnya pengelolaan OPK & CB IK: % benda, bangunan, struktur & situs CB dan WBTByg telah ditetapkan terhadap total regisrtasi			Meningkatnya pemanfaatan OPK & CB IK: % OPK yg diolah menjadi produk; % CB yg dimanfaatkan masy	Meningkatnya pembinaan kebudayaan IK: % SDM Kebudayaan yg bersertifikat; % Lembaga yg meningkat kapasitasnya	Meningkatnya partisipasi budaya IK: Angka Melek Budaya		Meningkatnya modal sosial IK: % penduduk yang mengikuti gotong royong		Meningkatnya kohesi sosial IK: IKUB	
Terlaksananya pendataan OPK & CB IK: % keterisian Dapobud oleh daerah	Terlaksananya pelindungan OPK & CB IK: % OPK & CB yg terdaftar; ; % arsip ditetapkan sebagai MKB	Terlaksananya pengembangan OPK IK: % karya budaya yg dikembangkan	Meningkatnya penduduk yg terlibat dalam karya budaya IK: % penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung karya budaya yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan	Terlaksananya pendataan SDM, Lembaga Kebudayaan IK: jumlah SDM, Lembaga Kebudayaan	Meningkatnya keterlibatan masy dalam event/kegiatan budaya IK: % penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Meningkatnya kesadaran masy dalam pelestarian kebudayaan IK: % masyarakat yang menggunakan produk tradisional; % penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun; % penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	Meningkatnya kesadaran masy dalam jejaring sosial IK: tingkat partisipasi masy dalam kegiatan/kerjasama sosial	Meningkatnya kepercayaan masy terhadap lingkungan IK: % tingkat kepercayaan publik	Meningkatnya toleransi antar umat beragama IK: nilai indeks tolerasi	Meningkatnya kesetaraan antar masy IK: nilai indeks kesetaraan

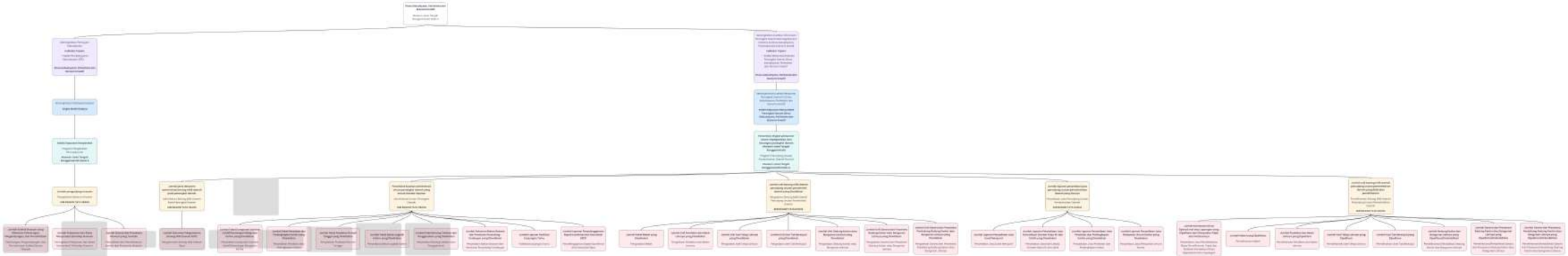

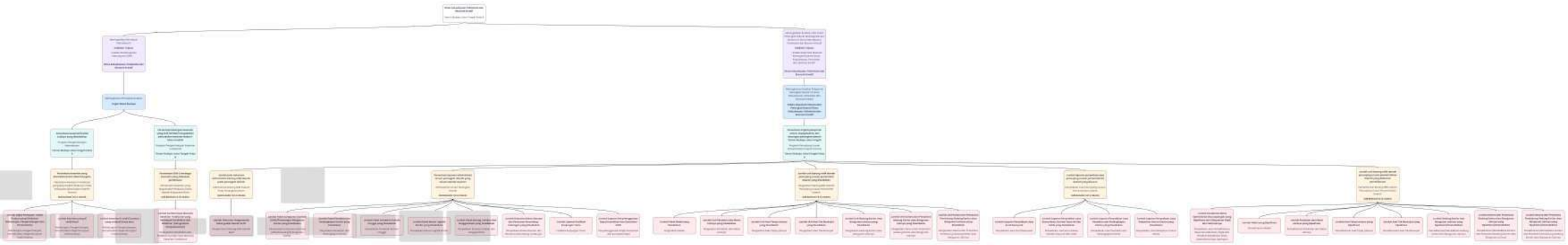

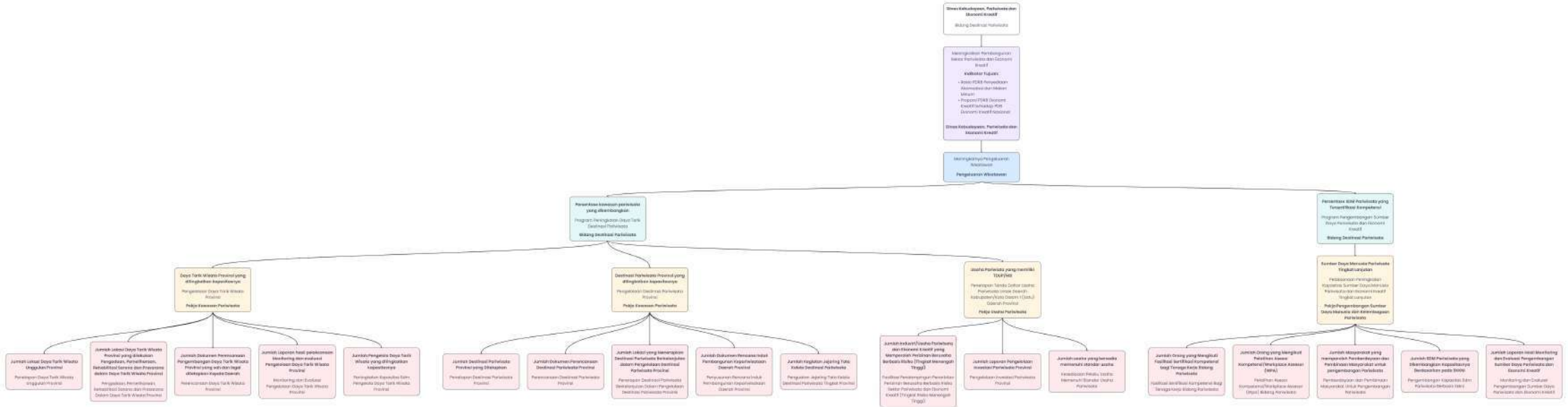
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Destinasi Pariwisata
Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator Tujuan:
• Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
• Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Pengelolaan Wisatawan
Pengelolaan Wisatawan
Perwujudan kawasan pariwisata yang dikembangkan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Bidang Destinasi Pariwisata
Pemenuhan SDM Pariwisata yang Tersertifikasi Kompetensi
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Destinasi Pariwisata
Daya Tarik Wisata Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
Paket Kewenangan Pariwisata
Destinasi Pariwisata Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
Paket Kewenangan Pariwisata
Usaha Pariwisata yang memiliki TDUP/NIB
Penerapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Rekanan Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Paket Usaha Pariwisata
Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Lanjutan
Pelaksanaan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Paket Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata
Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
Penetapan Daya Tarik Wisata unggulan Provinsi
Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang ada dan telah ditetapkan Kepala Daerah
Rekomendasi Daya Tarik Wisata Provinsi
Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya
Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi
Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan
Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
Jumlah Dokumen Pemasaran Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi
Penyusunan Pemasaran Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi
Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata
Pengelolaan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi
Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Pendirian Berusaha Berbasis Risiko (Tinggi/di Menengah Tinggi)
Fasilitasi Pendampingan Pemerintah Pelaksanaan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tinggi/di Risiko Menengah Tinggi)
Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi
Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi
Jumlah usaha yang berusaha memenuhi standar usaha
Verifikasi Perizinan Berusaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assessor (WPA)
Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assessor (Wpa) Bidang Pariwisata
Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata
Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berbasiskan pada SNWI
Pengembangan Kapasitas Sdm Pariwisata Berbasis Isknl
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

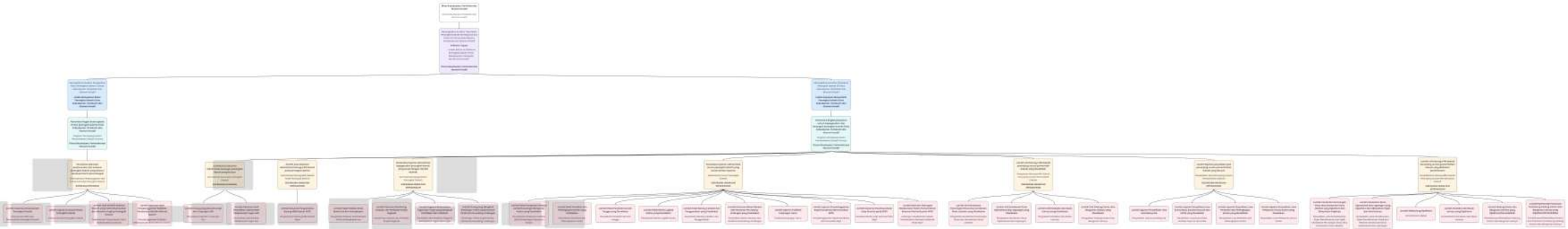

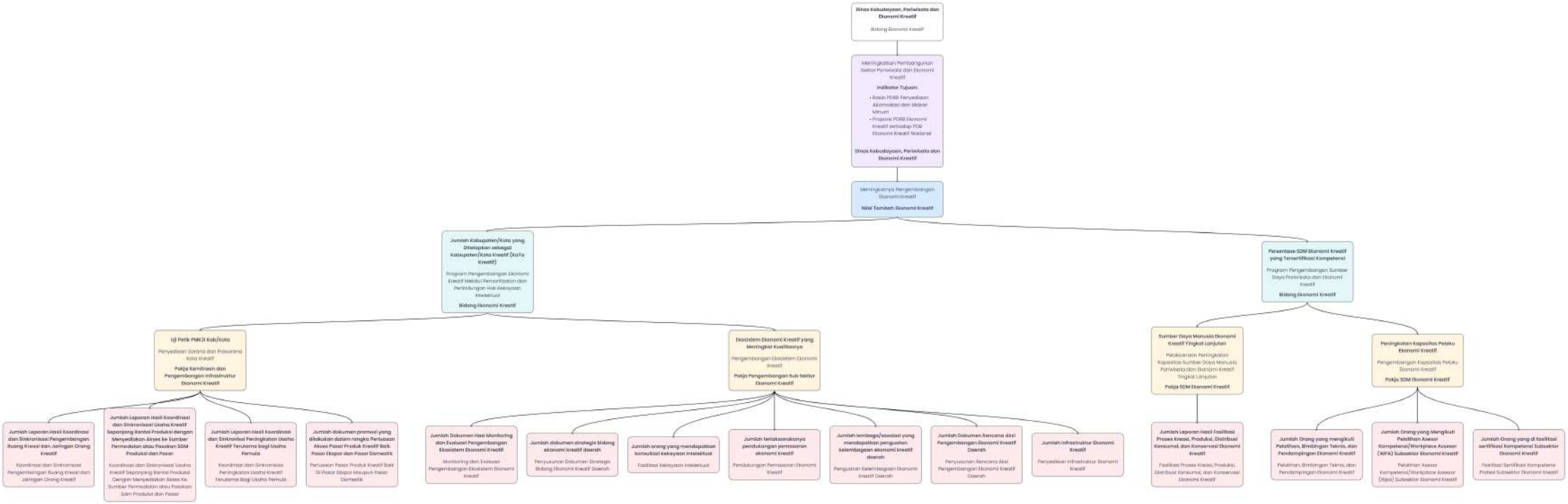
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Ekonomi Kreatif
Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator Tujuan:
• Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
• Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif
Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Bidang Ekonomi Kreatif
Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Ekonomi Kreatif
Uji Petik PMK2I Kab/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kualitasnya
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif
Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Pokja SDM Ekonomi Kreatif
Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Pokja SDM Ekonomi Kreatif
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi Dengan Menyediakan Akses Ke Sumber Permodalan atau Pasokan Sdm Produksi dan Pasar
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula
Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Di Pasar Ekspor dan Pasar Domestik
Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik Di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
Penyusunan Dokumen Strategis Bidang Ekonomi Kreatif Daerah
Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual
Fasilitasi Kekayaan Intelektual
Jumlah terlaksanakannya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif
Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif
Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif
Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assessor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif
Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assessor (Wpa) Subsektor Ekonomi Kreatif
Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif

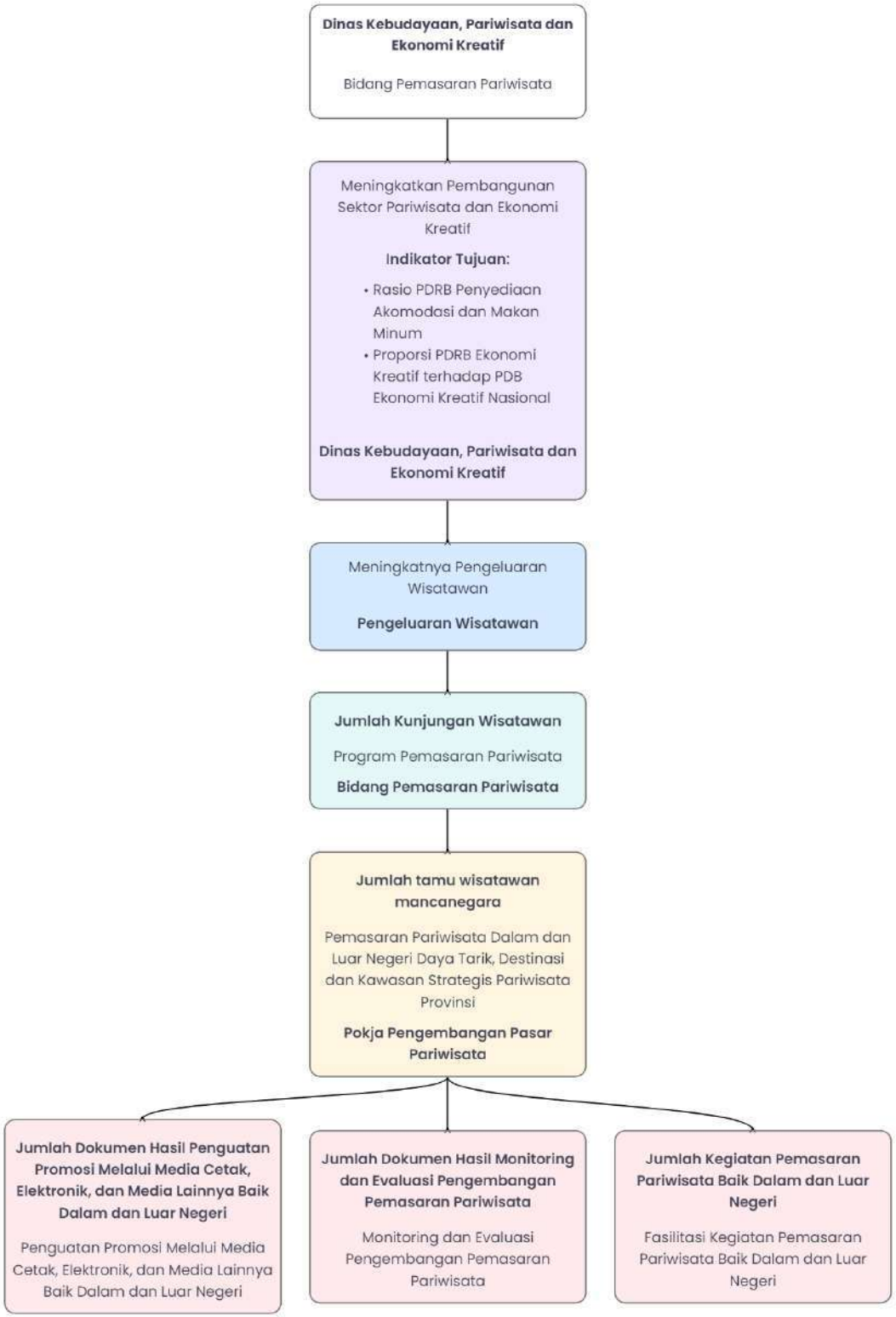
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Pemasaran Pariwisata
Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator Tujuan:
• Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
• Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan
Pengeluaran Wisatawan
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Program Pemasaran Pariwisata
Bidang Pemasaran Pariwisata
Jumlah tamu wisatawan mancanegara
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

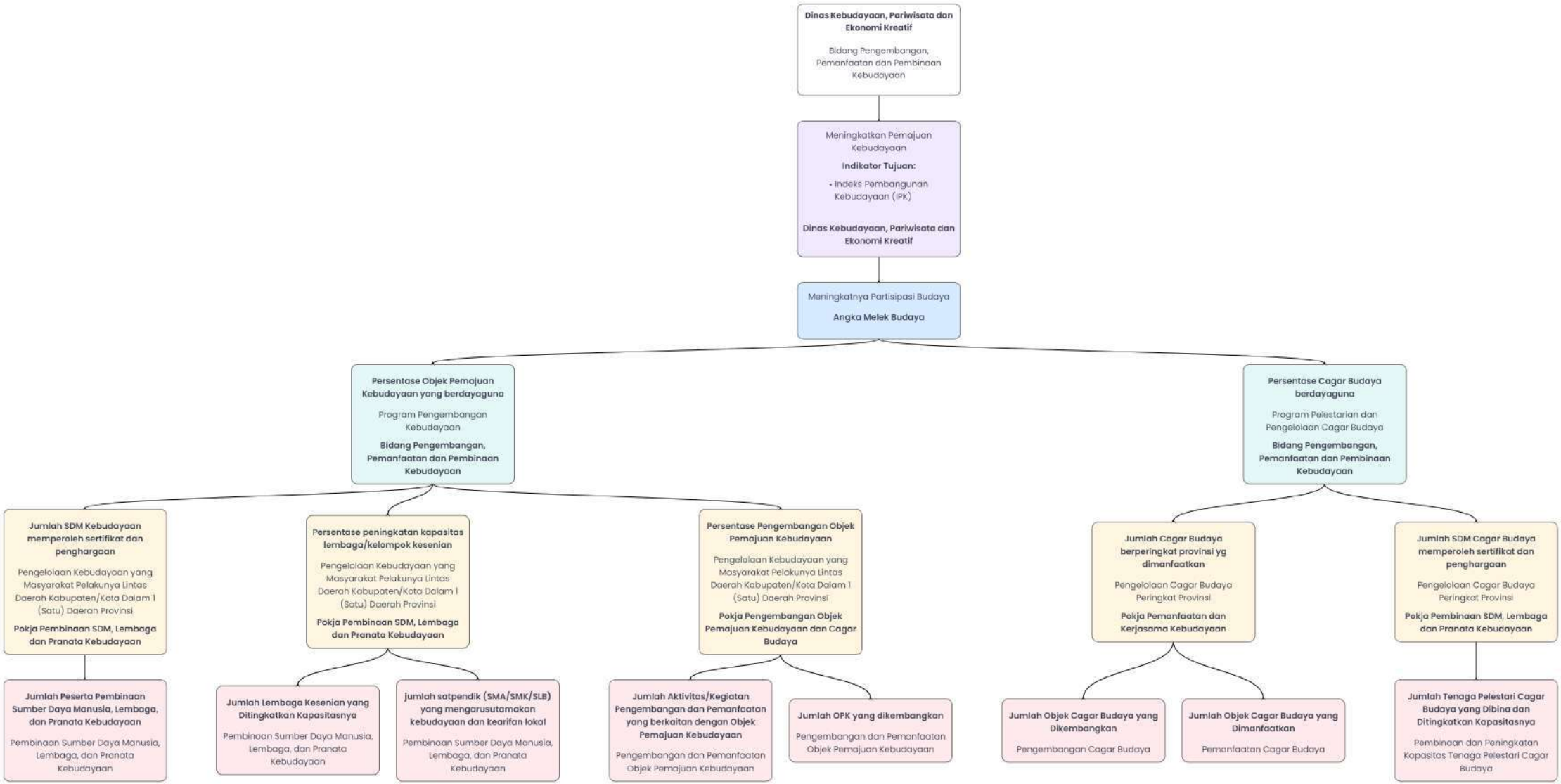
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan
Indikator Tujuan:
- Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Partisipasi Budaya
Angka Melek Budaya
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang berdayaguna
Program Pengembangan Kebudayaan
Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
Persentase Cagar Budaya berdayaguna
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
Jumlah SDM Kebudayaan memperoleh sertifikat dan penghargaan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan
Persentase peningkatan kapasitas lembaga/kelompok kesenian
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan
Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pokja Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya
Jumlah Cagar Budaya berperingkat provinsi yg dimanfaatkan
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
Pokja Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan
Jumlah SDM Cagar Budaya memperoleh sertifikat dan penghargaan
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan
Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Jumlah Lembaga Kesenian yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
jumlah satpendik (SMA/SMK/SLB) yang mengarusutamakan kebudayaan dan kearifan lokal
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan
Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Jumlah OPK yang dikembangkan
Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan
Pengembangan Cagar Budaya
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan
Pemanfaatan Cagar Budaya
Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya

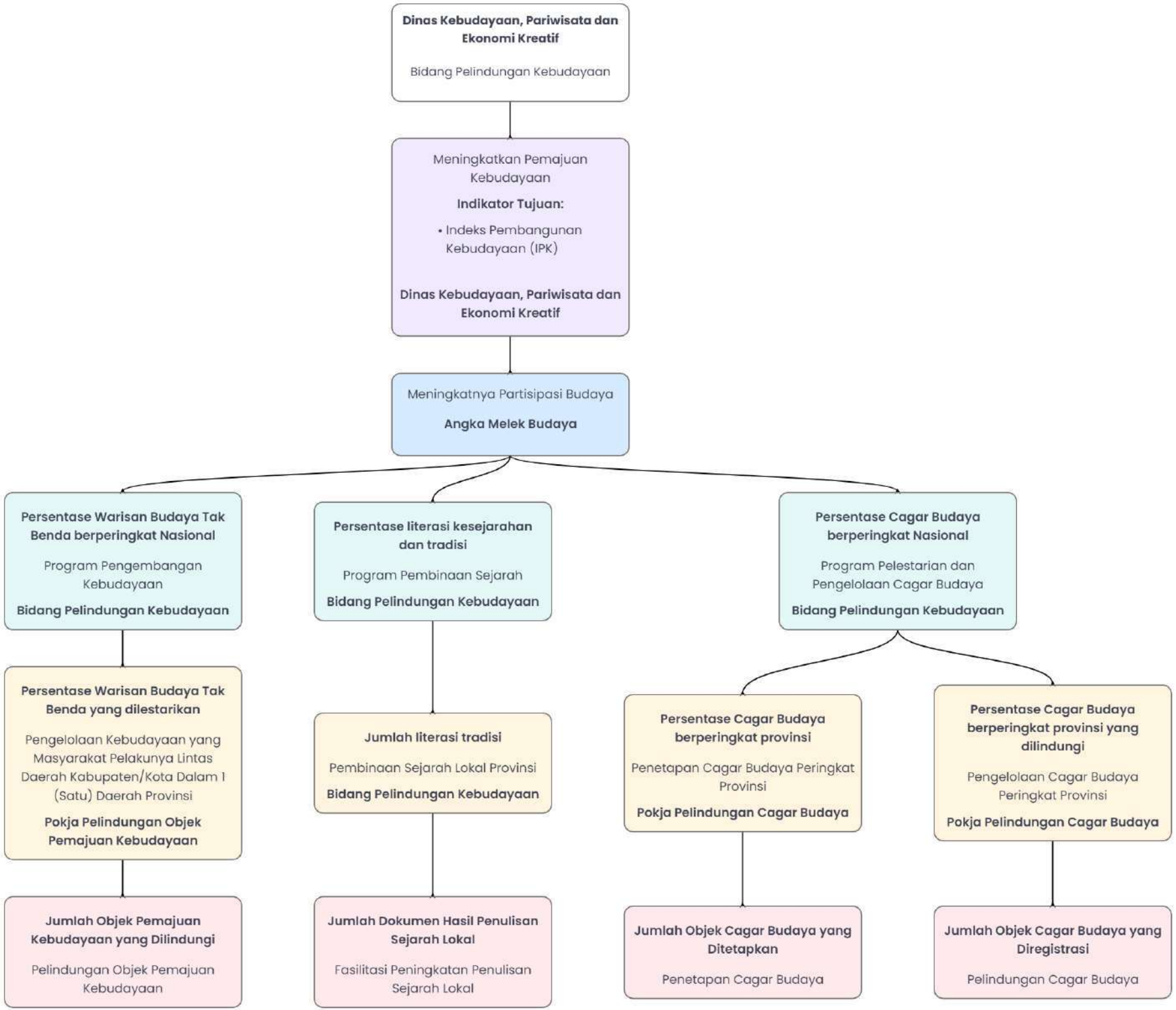
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bidang Pelindungan Kebudayaan
Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan
Indikator Tujuan:
• Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Partisipasi Budaya
Angka Melek Budaya
Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional
Program Pengembangan Kebudayaan
Bidang Pelindungan Kebudayaan
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pokja Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi
Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan
Persentase literasi kesejarahan dan tradisi
Program Pembinaan Sejarah
Bidang Pelindungan Kebudayaan
Jumlah literasi tradisi
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
Bidang Pelindungan Kebudayaan
Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal
Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Bidang Pelindungan Kebudayaan
Persentase Cagar Budaya berperingkat provinsi
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
Pokja Pelindungan Cagar Budaya
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan
Penetapan Cagar Budaya
Persentase Cagar Budaya berperingkat provinsi yang dilindungi
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
Pokja Pelindungan Cagar Budaya
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi
Pelindungan Cagar Budaya

CASCADING KINERJA URUSAN KEBUDAYAAN (PEMBAHASAN 27-02-2025)

KEPALA DINAS

MENINGKATNYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN
IK: IPK

Meningkatnya partisipasi budaya
IK: ANGKA MELEK BUDAYA

KEPALA BIDANG
Sasaran Strateois
Indikator Kinerja

KABID KEBUDAYAAN	KEPALA TBJT	~~KEPALA TBJT~~	KEPALA TBJT	KABID KEBUDAYAAN	~~Kepala UPTD~~	KABID KEBUDAYAAN	KEPALA MUSEUM
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	~~PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL~~	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan & pembinaan objek pemajuan kebudayaan			Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga Kesenian	Meningkatnya pelindungan dan pengembangan tradisi dan kesejarahan	~~Meningkatnya pengembangan kesenian tradisional~~	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya Tata Kelola Layanan Museum
1) Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional (Bidang Kebudayaan) 2) Persentase Jenis seni yang terlayani (TBJT)			Persentase Jenis seni yang terbina	Persentase literasi sejarah yang diakses masyarakat	~~Rerata kemitraan terhadap 5 lembaga yang semakin baik kapasitasnya~~	Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat

Kegiatan
Sasaran Operasional
Indikator Kinerja

Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	~~Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota~~	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pengelolaan Museum Provinsi
Meningkatnya pengelolaan kebudayaan	Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional	Meningkatnya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pembinaan sejarah lokal	~~Meningkatnya pembinaan kesenian~~	Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya	Meningkatnya pengelolaan museum
1) Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan 2) ~~Penambahan~~ Jumlah SDM Kebudayaan (selain CB) yang tersertifikasi 3) ~~Jumlah~~ Persentase lembaga/kelompok kesenian yang semakin baik kapasitasnya	Cakupan Ragam seni yang dilayani Taman Budaya Jawa Tengah	Cakupan Ragam seni yang dilakukan pembinaan oleh Taman Budaya Jawa Tengah	Jumlah literasi sejarah	~~Jumlah lembaga/kelompok kesenian yang semakin baik kapasitasnya~~	Persentase CB berperingkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya berdayaguna	Jumlah pengunjung museum

Sub Kegiatan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	~~Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai Kebutuhan dan Tuntutan~~	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	~~Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional~~	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	~~Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional~~	Penetapan Cagar Budaya	Pelindungan Cagar Budaya	Pengembangan Cagar Budaya	Pemanfaatan Cagar Budaya	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	~~Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman~~
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	~~Terlaksananya Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai Kebutuhan dan Tuntutan~~	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	~~Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional~~	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Terlaksananya Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	~~Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional~~	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	~~Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman~~
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	1) Jumlah peserta pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	~~Jumlah SDM Kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi~~	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	~~Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya~~	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal, Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Dokumen Data dan informasi Sejarah yang dapat di akses masyarakat	~~Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya~~	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya **) def ops: Jumlah SDM CB yang bersertifikat + Jumlah SDM CB yang ditingkatkan kapasitas*	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum *def ops: kegiatan museum a.l: sosialisasi, pameran, dsb-nya*	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	~~Jumlah SDM Permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya~~
**) diluar Kepmendagri*	~~2) Jumlah SDM Kebudayaan yang tersertifikasi~~ ~~**) def ops: jumlah SDM Kebudayaan (selain CB) yang tersertifikasi baru (bukan memperpanjang sertifikasi)*~~ ~~**) satuan: sertifikat*~~	*--- pembahasan TBJT ditunda --- (per 05/03)*	*--- aktivitasnya melekat/jadi satu dengan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dgn pertimbangan SDM Kesenian bagian dari SDM Kebudayaan ---*	*--- aktivitas pembinaan di dalamnya termasuk utk lembaga, perhitungan utk lembaga bisa dihitung dengan berapa orang dari lembaga yg diikrim untuk ditingkatkan kapasitasnya ---*				*--- aktivitasnya dipindahkan ke PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN dgn pertimbangan aktivitas subkegiatan (Kepmendagri) tidak menunjang/menjawab sasaran PROGRAM ---*					~~Jumlah Tenaga Pelestari yang tersertifikasi~~ ~~**) def ops: jumlah tenaga pelestari CB yang tersertifikasi baru (bukan memperpanjang sertifikasi)*~~ ~~**) satuan: sertifikat*~~			*--- aktivitasnya melekat/jadi satu dengan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dgn pertimbangan SDM Permuseuman bagian dari SDM Kebudayaan ---*
	2) Jumlah Lembaga Kesenian yang Ditingkatkan Kapasitasnya **) def ops: jumlah lembaga kesenian yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas* **) satuan: lembaga*																

Aktivitas Ril

- parade seni --> pawai untuk HUT Jateng
- pentas seni untuk permintaan tampilan PD/lembaga
- tampilan untuk aktivitas/kegiatan khusus lainnya/hari besar
- seleksi Gita Bahana Nusantara (dari level Kab/Kota - Prov - Nas)
- lomba lagu daerah & lomba tari Nusantara (penyelenggara: TMII) --> memfasilitasi seleksi & pengiriman di Kab/Kota
- lomba dalang anak --> festival utk anak & remaja, prov memfasilitasi seleksi & pengiriman di Kab/Kota (penyelenggara: PEPADI pusat)
- & aktivitas lomba lainnya yg bersifat pengiriman berenianv hingga ke tingkat Nas

1) Sertifikasi SDM permuseuman & lainnya (di luar CB) : pemberian penghargaan kepada budayawan yg bersifat tidak rutin/reguler
2) Hibah lembaga

- aktivitas/pentas seni yg diselenggarakan masy umum
- PKIUT --> pentas untuk tampilan event/kegiatan Kab/Kota
- lomba dalang bocah --> bukan bersifat lomba
- upaya pelindungan/pelestarian dari aktivitas kesenian akan fokus di TBJT --> seperti: pengkajian seni X krn untuk menunjang standarisasi Taman Budaya yg dituntut melekat 3 aspek (di Pelindungan hingga Pemanfaatan)

3.2. Manajemen Risiko Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.4
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Dinas Kebudayaan, Pariwisaya dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 – 2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Tujuan : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Indek Pembangunan Kebudayan	Ketimpangan nilai budaya dengan pengaruh global	3	Arus budaya asing yang masuk dan menyebar	Menurunnya keragaman budaya bangsa, kerusakan/ hilangnya Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, ketidak seimbangan pengembangan dan pelestarian	Pelestarian nilai-nilai budaya dan Pemberdayaan ekositem kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahun 2029
Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Budaya	Angka Melek Budaya	Hilangnya identitas karena pengaruh global	3	Kesadaran berbudaya masih rendah, era society 5.0 dan budaya luar yang lebih progresif masuk ke sendi kehidupan	Krisis identitas atau orang Jawa kehilangan Jawanya	Fasilitasi dan kolaborasi ruang-ruang ekspresi budaya untuk memperkenalkan dan menarik generasi muda sadar akan budayanya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahun 2027
Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Masih rendahnya insentif, perlindungan produk, anggaran pengembangan	9	1. Rendahnya minat para investor dalam	Belum optimalnya capaian target Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Melakukan pemasaran terkait potensi daya tarik	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Setiap Tahun

	terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional				terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional			

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	ekonomi Kreatif	parekraf, pembinaan, minimnya fasilitas parekraf, pemasaran parekraf, hingga belum optimalnya pasar domestik dan internasional yang mendukung pertumbuhan industri Parekraf di Provinsi Jawa Tengah		maupun luar negeri untuk berinvestasi pada sektor parekraf di Provinsi Jawa Tengah 2. Rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah 3. Strategi pemulihan Industri Parekraf belum dilakukan secara optimal	Kreatif	Wisata Jawa Tengah untuk meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan serta peningkatan mutu produk dan SDM Parekraf di Provinsi jawa tengah	Provinsi Jawa Tengah	

Sasaran 1: Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan	Pengeluaran Wisatawan	Menurunnya intensitas perjalanan wisatawan dan perubahan kebijakan dari pariwisata massal menjadi pariwisata yang berkualitas	9	1. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 2. Kurangnya dukungan kepada para pelaku parekraf dalam beradaptasi melalui teknologi digital, strategi	1. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 2. Kurangnya dukungan kepada pelaku parekraf melalui teknologi digital, strategi pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata berkelanjutan	Melakukan sosialisasi kepada pelaku parekraf	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	ekonomi Kreatif	parekraf, pembinaan, minimnya fasilitas parekraf, pemasaran parekraf, hingga belum optimalnya pasar domestik dan internasional yang mendukung pertumbuhan industri Parekraf di Provinsi Jawa Tengah		maupun luar negeri untuk berinvestasi pada sektor parekraf di Provinsi Jawa Tengah 4. Rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah 5. Strategi pemulihan Industri Parekraf belum dilakukan secara optimal	Kreatif	Wisata Jawa Tengah untuk meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan serta peningkatan mutu produk dan SDM Parekraf di Provinsi jawa tengah	Provinsi Jawa Tengah	

Sasaran 1: Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan	Pengeluaran Wisatawan	Menurunnya intensitas perjalanan wisatawan dan perubahan kebijakan dari pariwisata massal menjadi pariwisata yang berkualitas	9	3. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 4. Kurangnya dukungan kepada para pelaku parekraf dalam beradaptasi melalui teknologi digital, strategi	3. Rendahnya kepercayaan wisatawan pada aspek kualitas pelayanan 4. Kurangnya dukungan kepada pelaku parekraf melalui teknologi digital, strategi pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata berkelanjutan	Melakukan sosialisasi kepada pelaku parekraf	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
				pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata berkelanjutan				
Sasaran 2: Meningkatnya Jumlah Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang ditetapkan	Penetapan Kab/Kota (KaTa) Kreatif	Kurangnya pemahaman tentang Kab/Kota (KaTa) Kreatif	9	1. Kurangnya dukungan kolaborasi antar elemen ekraf di kab/kota 2. Kurang Optimalnya kreativitas dan inovasi-inovasi baru serta kolaborasi dengan jejaring pentahelix di Kab/Kota 3. Kurangnya regulasi terkait kebijakan tentang Ekraf	Kurangnya minat Kab/Kota (KaTa) mengikuti PMK3I	Optimalisasi kemitraan dengan stakeholder parekraf	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun

Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Kawasan Pariwisata pada setiap Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Pariwisata yang dikembangkan	pengembangan kawasan pariwisata tidak disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung lainnya	9	perencanaan lintas sektoral pada Pengembangan Kawasan Pariwisata dari segi aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ancillary kurang terkoordinasi	Hasil pengembangan kawasan pariwisata belum optimal dimanfaatkan	Optimalisasi pengembangan Kawasan Pariwisata dari segi aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ancillary	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Sasaran : Meningkatnya Kab/Kota yang dipetakan dan diidentifikasi potensinya untuk menetapkan subsektor ekraf yang bisa menjadi unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PMK3I)	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang teruji petik	Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang teruji petik tidak sesuai target waktu yang ditentukan	6	Kurangnya Pemahaman pelaku ekraf tentang Kabupaten/Kota kreatif (KaTa kreatif) dan minimnya pembiayaan	Proses Uji petik Kab/Kota (KaTa) Kreatif menjadi lebih lama	Optimalisasi pemahaman KaTa kreatif dan penyediaan anggaran	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun
Sasaran : Meningkatnya SDM Parekraf yang tersertifikasi	Jumlah SDM Parekraf yang Tersertifikasi	Kurangnya fasilitasi sertifikasi uji kompetensi SDM Parekraf	9	Rendahnya dukungan dan penguatan sektor parekraf	Kurangnya SDM Parekraf yang kompeten	Penguatan fasilitasi sertifikasi uji kompetensi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Setiap Tahun

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa telah ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025 – 2030, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 guna menjabarkan visi, misi dan program unggulan Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya secara pararel Perangkat Daerah harus menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029, yang mana Renstra PD tersebut merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.

Bahwa Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah.

Mendasari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih periode tahun 2025 – 2030, maka disusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Renstra dimaksud dimulai dari pembentukan Tim Penyusun dan Pelaksana Forum Perangkat Daerah, Penyusunan Pohon Masalah dan Pohon Kinerja, Penyusunan *Cascading*, Identifikasi Risiko Strategis, Penyusunan Rancangan Awal Renstra, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan proses tahapan rancangan awal dan akhir sampai dengan penetapan Renstra tersebut

Dokumen Renstra dalam hal ini, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan sekaligus penjabaran atas pembangunan jangka menengah daerah di lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dalam hal ini, Dinas Kearsipan dan PerpSustakaan Provinsi Jawa Tengah menyajikan tiga aspek utama yaitu sasaran yang dicapai, strategi dan arah kebijakan pencapaiannya serta perumusan program dan kegiatan. Dokumen Renstra Dinas tersebut akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029, ini dilakukan melalui proses identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah; penerjemahan kewenangan melalui tugas dan fungsi Dinas sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka dirumuskan tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan; serta penetapan target kinerja dan proyeksi kebutuhan pendanaanya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 19550 Halaman 8692);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun / Bab I -4 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
12. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Tengah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 36).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan pedoman dan acuan di lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2025 – 2029, ini dimaksudkan untuk :

1) Sebagai acuan penerapan strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
2) Tersusunnya dokumen perencanaan sebagai pedoman dan atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

3) Sebagai acuan dalam penyusunan penentuan sasaran dan arah kebijakan serta program dan kegiatan prioritas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
4) Tersusunnya penentuan tolok ukur keberhasilan kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
5) Mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi tujuan dan sasaran.

b. Tujuan

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, disusun untuk menentukan arah dan tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta untuk tujuan strateginya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator)* yang terukur. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 -2029, adalah sebagai berikut :

1) Sebagai alat sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan dengan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.
2) Sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
3) Sebagai dasar pengukuran kinerja sampai dengan akhir pelaksanaan Renstra tahun 2025 -2029.
4) Sebagai dasar untuk stakeholder terkait guna melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Latar belakang mengemukakan pengertian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas, keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD , dan dengan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

1.4. Sistematika penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta garus besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH.

2.1. Tugas, fungsi dan Sturuktur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi, kemudian jumlah personil dan tata laksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (proses, prosedur dan mekanisme).

2.2. Sumber Daya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya). Memuat tentang hal-hal yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bedasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan periode sebelumnya dan indicator kinerja pelayanannya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH.

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Pada bab ini berisikan tentang permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan yang ada dalam hal ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dan capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

3.2. Penentuan Isu Strategis.

Pada bagian ini, di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas yang mempengaruhi pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, ditinjau dari :

a. Gambaran pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
c. Sasaran jangka menengah dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah
e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Pada bagian ini, diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang disertai dengan indicator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu dan dirumuskan secara spesifik dan realistis serta dapat menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangangi issue strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Adapun tujuan Dinas tersebut adalah menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas. Tujuan merupakan outcome dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan tujuan dilakukan dengan mengambil

intisari dari pernyataan isu, permasalahan dan peluang.

b. Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan mudah di dapat. Perumusan sasaran didasarkan pada tugas dan fungsi, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Adapun indicator kinerja sasaran yang digunakan merupakan outcome untuk jangka menengah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN:
Strategi merupakan rangkaian tahapan yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan yang akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga memperjelas strategi agar lebih dapat spesifik dan fokus, konkrit dan operasional. Kebijakan juga digunakan agar dapat mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus seklaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN.
Bab ini memuat indikator kinerja, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, IKU merupakan indikator tujuan dan / atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV, selain daripada itu, IKU Dinas juga ditetapkan indicator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kearsipan dan Perpustakaan, yang merujuk pada indikator program pada Bab V

BAB VIII PENUTUP.

Pada bab ini berisikan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun manakala kemampuan/ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Adanya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional karena pemerintah pusat ingin menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai langkah peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, dengan dasar itulah pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Melalui penyetaraan Jabatan Struktural (eselon III) dan Struktural (eselon IV) ke Jabatan Fungsional diharapkan mengubah kultur birokrasi menjadi lebih baik, pemangku jabatan fungsional juga memiliki motivasi lebih tinggi dalam meningkatkan skill keterampilan, dan mempelajari pengetahuan baru sesuai dengan jabatan fungsional yang diikuti, termasuk memiliki peluang dalam mengembangkan gagasan atau ide kreatif lebih luas.

Uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk Pejabat Struktural Eselon IV yang penyebutan semula Kepala Seksi menjadi Sub Koordinator dengan uraian tugas sama dengan Pejabat Struktural Eselon IV. Sub koordinator merupakan fungsi tambahan yang diberikan akibat terdampak penyetaraan dari pejabat administrasi setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi. Pemberian fungsi tambahan tersebut dipastikan bahwa hak-hak keuangan dan fasilitas yang diterima bagi pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi tidak berkurang.

Di bawah ini kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
2. Tugas Pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik

yaitu dibidang perpustakaan dan kearsipan.

3. Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah :
   a. Perumusan kebijakan teknis dibidang arsip dan perpustakaan
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Lebih lanjut pengaturan uraian tugas sekretariat, bidang, sub bagian dan seksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- Unsur pimpinan atau *top management* dalam hal ini adalah **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah, sedangkan fungsinya :
  - perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelolaan perpustakaan, dan pengembangan perpustakaan;
  - pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelolaan perpustakaan, dan pengembangan perpustakaan;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelolaan perpustakaan, dan pengembangan perpustakaan pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

- Unsur Pimpinan dalam manajemen menengah *(middle management)* ada 1 (satu) sekretaris dan 5 (lima) Bidang yang dikembangkan sesuai dengan fungsi organisasi yang terdiri dari**:**

a. Sekretariat

Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Fungsi:

1) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
7) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Program

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang program.

Tugas Subbagian program sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kajian teknis di bidang program;
c. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
d. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Keuangan

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan.

Tugas Subbagian Keuangan sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kajian teknis di bidang keuangan;
c. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
d. Menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan dilingkungan Dinas;
e. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian.

Tugas Subbag. Umum dan Kepegawaian:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kajian teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
c. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
d. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
f. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan dilingkungan Dinas;
g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi dilingkungan dinas;
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan dilingkungan Dinas;
i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan

Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, dalam melaksanakan tugas bidang.

Fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, kordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan kearsipan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordiansi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kearsipan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.

Tugas Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknis di pembinaan dan pengembangan kearsipan;
b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan kearsipan;
c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kearsipan;
d. Menyiapkan bahan pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik dan masyarakat;
e. Menyiapkan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria kearsipan;
f. Menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem kearsipan;
g. Menyiapkan bahan penyusunan kajian bidang kearsipan;
h. Menyiapkan bahan pengembangan laboratorium sistem kearsipan;
i. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang kearsipan;
j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan dan pengembangan kearsipan; dan

k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pengawasan Kearsipan

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan Kearsipan

Tugas Seksi Pengawasan Kearsipan:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan kearsipan;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengawasan kearsipan;
c. Menyiapkan bahan audit kearsipan dan penilaian hasil pengawasan kearsipan;
d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kearsipan; dan
e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip

Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dann pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pelestarian arsip.

Fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuisisi arsip;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan arsip;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian arsip; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Koordinator Akuisisi Arsip

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Akuisisi Arsip.

Tugas Sub Koordinator Akuisisi Arsip :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang akuisisi arsip;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang akuisisi arsip;
c. Menyiapkan bahan penilaian dan verifikasi arsip yang akan disusutkan;

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi akuisisi arsip;
e. Menyiapkan bahan akuisisi, penerimaan pemindahan dan penyerahan arsip;
f. Menyiapkan bahan penelusuran dan wawancara sejarah lisan;
g. Menyiapkan bahan penyelamatan arsip vital daerah;
h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang akuisisi arsip; dan
i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pengolahan Arsip

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengolahan Arsip

Tugas Sub Koordinator Pengolahan Arsip:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan arsip;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengolahan arsip;
c. Menyiapkan bahan pengolahan fisik dan informasi arsip;
d. Menyiapkan bahan penataan fisik arsip;
e. Menyiapkan bahan penyusunan indeks, guide, daftar, dan inventaris arsip;
f. Menyiapkan bahan transkrip rekaman suara;
g. Menyiapkan bahan penyusunan arsip citra daerah;
h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan arsip; dan
i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pelestarian Arsip

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelestarian Arsip

Tugas Sub Koordinator Pelestarian Arsip:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelestarian arsip;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pelestarian arsip;
c. Menyiapkan bahan pelestarian arsip dalam bentuk penyelamatan, pemeliharaan, dan perlindungan arsip;
d. Menyiapkan bahan alih media dan reproduksi arsip statis;
e. Menyiapkan bahan pengujian kualitas media arsip dan sarana kearsipan;
f. Menyiapkan bahan restorasi arsip dan registrasi arsip;
g. Menyiapkan bahan autentikasi arsip statis;

h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian arsip; dan
i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip

Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan pemanfaatan arsip.

Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan arsip;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan arsip; dan
3) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Layanan Arsip

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Layanan Arsip

Tugas Sub Koordinator Layanan Arsip:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan arsip;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang layanan arsip;
c. Menyiapkan bahan penelusuran sumber dan wisata arsip;
d. Menyiapkan bahan penyajian informasi arsip dan penerbitan naskah sumber arsip;
e. Menyiapkan bahan penyusunan tayangan naskah sumber arsip;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi kearsipan;
g. Menyiapkan bahan penghimpunan dan penyajian data dan informasi kearsipan;
h. Menyiapkan bahan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional;
i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan arsip; dan
j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pemanfaatan Arsip

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan dibidang Pemanfaatan Arsip

Tugas Sub Koordinator Pemanfaatan Arsip:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan arsip;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemanfaatan arsip;
c. Menyiapkan bahan pameran kearsipan, publikasi kearsipan dan pemasyarakatan kearsipan;
d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan arsip; dan
e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang deposit dan pelestarian bahan perpustakaan,akuisisi,dan pengolahan bahan perpustakaan, layanan dan otomasi perpustakaan

Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Deposit Dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Akuisisi Dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan otomasi perpustakaan;
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub koordinator Layanan dan Otomasi Perpustakaan

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan dan otomasi perpustakaan:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan dan otomasi perpustakaan;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang layanan dan otomasi perpustakaan;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan menetap dan layanan ekstensi perpustakaan;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan promosi layanan;
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi dan perpustakaan;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan media sosial;
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan perpustakaan digital, teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan;
h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan otomasi perpustakaan; dan
i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Akusisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Akusisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

Tugas Seksi Akusisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akusisi dan pengolahan bahan perpustakaan;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang akusisi dan pengolahan bahan perpustakaan;
c. Menyiapkan bahan pengembangan bahan perpustakaan;
d. Menyiapkan bahan pencarian, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan perpustakaan;
e. Menyiapkan bahan akuisisi bahan perpustakaan;
f. Menyiapkan bahan pembinaan koleksi meliputi survey, analisis kebutuhan pemustaka;
g. Menyiapkan bahan pengembangan koleksi *Jatengsiana*;
h. Menyiapkan bahan pengembangan koleksi digital;
i. Menyiapkan bahan pengolahan bahan perpustakaan;
j. Menyiapkan bahan verifikasi, validasi, pemasukan data bibliografi ke pangkalan data;
k. Menyiapkan bahan penyusunan literatur sekunder;
l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang akuisisi dan pengolahan bahan perpustakaan; dan
m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang deposit dan pelestarian bahan perpustakaan;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang deposit dan pelestarian bahan perpustakaan;
c. Menyiapkan bahan penerimaan, pengumpulan, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya

rekam;

d. Menyiapkan bahan penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literatur sekuler;
e. Menyiapkan bahan pemantauan dan tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
f. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan bahan perpustakaan kelabu;
g. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam dengan penerbit, perangkat daerah, badan usaha milik daerah, instansi terkait, dan masyarakat;
h. Menyiapkan bahan penganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan transliterasi, translasi, dan sejenisnya;
i. Menyiapkan bahan pembuatan direktori penerbit;
j. Menyiapkan bahan survey kondisi bahan perpustakaan;
k. Menyiapkan bahan konservasi dalam perawatan dan pengawetan bahan perpustakaan;
l. Menyiapkan bahan restorasi bahan perpustakaan melalui perbaikan fisik dan kandungan informasi bahan perpustakaan;
m. Menyiapkan bahan pemeliharaan bahan perpustakaan dan alih media bahan perpustakaan;
n. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang deposit dan pelestarian bahan perpustakaan; dan
o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Bidang Pengembangan Perpustakaan

Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perpustakaan.

Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan perpustakaan;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan kerja sama perpustakaan;
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan kegemaran membaca;
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Koordinator Pembinaan Perpustakaan

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pembinaan Perpustakaan

Tugas Seksi Pembinaan Perpustakaan:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan perpustakaan;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pembinaan perpustakaan;
c. Menyiapkan bahan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perpustakaan;
d. Menyiapkan bahan pendataan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
e. Menyiapkan bahan bimbingan teknis perpustakaan dan kepustakawanan;
f. Menyiapkan bahan fasilitasi penilaian angka kredit pustakawan;
g. Menyiapkan bahan penilaian program dan kegiatan bidang perpustakaan;
h. Menyiapkan bahan pemasyarakatan bidang perpustakaan;
i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan perpustaakaan; dan
j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan.

Tugas Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan kerjasama perpustakaan;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan dan kerjasama perpustakaan;
c. Menyiapkan bahan pengembangan bidang perpustakaan dan kepustakawan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
e. Menyiapkan bahan pendataan perpustakaan;
f. Menyiapkan bahan pengkajian pengembangan perpustakaan dan kepustakawanan;
g. Menyiapkan bahan kerja sama bidang perpustakaan dan kepustakawanan;
h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan kerja sama perpustakaan; dan
i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pembudayaan Kegemaran Membaca

Tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pembudayaan Kegemaran Membaca

Tugas Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembudayaan kegemaran membaca;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pembudayaan kegemaran membaca;
c. Menyiapkan bahan pembudayaan kegemaran membaca pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi tentang perpustakaan;
d. Menyiapkan bahan pembudayaan kegemaran membaca penerbitan media komunikasi perpustakaan dan pustakawan;
e. Menyiapkan bahan pembudayaan kegemaran membaca promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
f. Menyiapkan bahan pembudayaan kegemaran membaca pemasyarakatan pembudayaan kegemaran membaca;
g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan kegemaran membaca; dan
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas:

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi:

1) Perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
2) Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestraian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustkaan, pengembangan perpustakaan;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
4) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan

Dinas; dan

5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

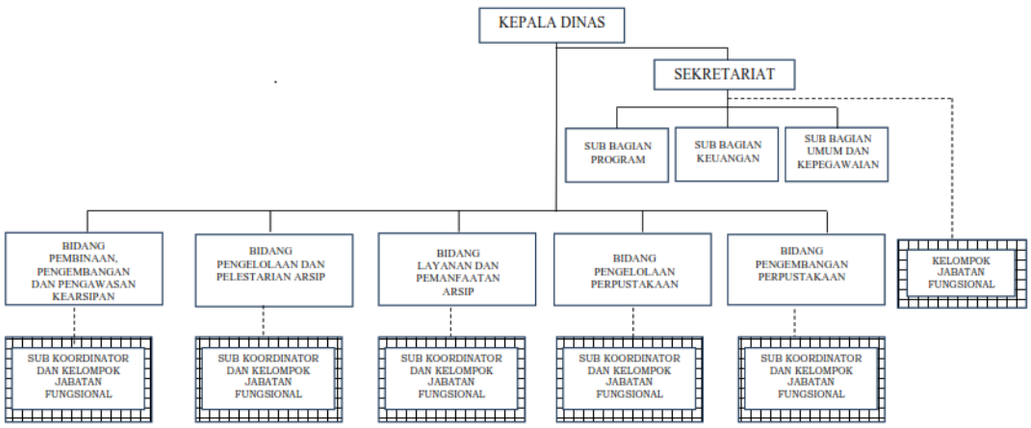

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

1. Sub Bagian Program
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan

1. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan
2. Sub Koordinator Pengawasan Kearsipan

d. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

1. Sub Koordinator Akuisisi Arsip
2. Sub Koordinator Pengolahan Arsip
3. Sub Koordinator Pelestarian Arsip

e. Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip

1. Sub Koordinator Layanan Arsip
2. Sub Koordinator Pemanfaatan Arsip

f. Bidang Pengelolaan Perpustakaan

1. Sub Koordinator Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
2. Sub Koordinator Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
3. Sub Koordinator Layanan dan Otomasi Perpustakaan

g. Bidang Pengembangan Perpustakaan

1. Sub Koordinator Pembinaan Perpustakaan
2. Sub Koordinator Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan
3. Sub Koordinator Pembudayaan Kegemaran Membaca

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

1. Fungsional Arsiparis
2. Fungsional Pustakawan
3. Fungional Analis Kepegawaian

2. 2. Sumber Daya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya cukup memadai dan dapat mendukung berbagai kegiatan yang berlangsung di masing-masing bidang, baik untuk urusan kearsipan dan perpustakaan. Sumber daya utama yang perlu dioptimalkan dalam Renstra ini adalah sumber daya manusia yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, sarana prasarana pendukung yang dimiliki, besarnya anggaran untuk penyelenggaraan program kegiatan yang ada serta khasanah arsip dan koleksi bahan perpustakaan yang dimiliki.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah perlu didukung oleh sumber daya manusia yang ada mulai dari tingkat eselon II, eselon III, eselon IV dan Sub Koordinator serta pejabat fungsional pustakawan, arsiparis dan jabatan fungsional umum, uraian berikut ini memberikan gambaran secara lebih rinci:

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah personil di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 146 orang PNS dan 43 orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Personil Berdasarkan Fungsi

No	Bagian/Bidang/Sub Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala (Top Manajemen)	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-
	a Subag Program	2	2	4
	b Subag Keuangan	5	6	11
	c Subag Umum dan Kepegawaian	11	9	20
3	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	-	-	-
	Pelaksana	1	-	1
	JF	6	7	13
4	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	1	-	1
	Pelaksana	4	-	4
	JF	7	14	21

5	Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip	-	1	1
	Pelaksana	1	-	1
	JF	6	7	13
6	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	-	1	1
	Pelaksana	6	2	8
	JF	6	20	26
7	Bidang Pengembangan Perpustakaan	1	-	1
	Pelaksana	3	1	4
	JF	7	8	15
	JUMLAH	68	78	**146**

(*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. Desember 2024)*

Table 2.2

Komposisi Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Jumlah	%
Aparatur Sipil Negara (ASN)		
- Jabatan Struktural	8	4.23
- Jabatan Fungsional Pustakawan	41	21.69
- Jabatan Fungsional Arsiparis	53	28.04
- Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian	2	1.06
- Pelaksana	42	22.22
Non Aparatur Sipil Negara (ASN)		
- Non ASN	23	12.17
- Outsourcing	20	10.58
Jumlah	**189**	**100,00**

(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. Desember 2024)

Table 2.3

Komposisi personil berdasarkan golongan/pendidikan

No.	Struktural	Jumlah
1.	Eselon II a	1 orang
2.	Eselon III a	4 orang
3.	Eselon IV a	3 orang
Fungsional		
1.	Arsiparis (PPPK 2)	53 orang
2.	Pustakawan (PPPK 3)	41 orang
3.	Analis Kepegawaian (PPPK 1)	2 orang
3.	Fungsional Umum	42 orang
Golongan		
1.	Gol. IV	41 orang
2.	Gol. III	76 orang
3.	Gol. II	22 orang
4.	Gol. I	1 orang
5.	Gol.IX (PPPK Pustakawan)	3 Orang
6.	Gol.IX (PPPK Analis Kepegawaian)	1 Orang
7.	Gol.IX (PPPK Arsiparis)	1 Orang
8.	Gol.VII (PPPK Arsiparis)	1 Orang
Pendidikan		
1.	S2	23 orang
2.	S1	64 orang

No.	Struktural	Jumlah
3.	DIV	5 orang
4.	D3	27 orang
5.	SMA	26 orang
6.	SMP	- orang
7.	SD	1 orang
Non PNS		
1.	Tenaga Non ASN	23 orang
2.	Outsourcing	20 Orang

(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. Desember 2024)

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, perlu didukung oleh 3 (tiga) kelompok jabatan fungsional, yaitu : Pustakawan, Arsiparis dan Analis SDM Aparatur. Jumlah pejabat fungsional dimaksud berjumlah 96 orang dengan komposisi 41 orang Pustakawan, 53 orang Arsiparis. dan Analis Kepegawaian 2 orang. Berdasarkan jenjang jabatan, komposisi dua jabatan fungsional secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan, Arsiparis, Analis Kepegawaian

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah
1	**PUSTAKAWAN**	
	Tingkat Terampil	
	- Asisten Pustakawan Terampil	4 orang
	- Asisten Pustakawan Mahir	0 orang
	- Asisten Pustakawan Penyelia	4 orang
	Tingkat Ahli	
	- Pustakawan Ahli Pertama	7 orang
	- Pustakawan Ahli Muda	10 orang
	- Pustakawan Ahli Madya	15 orang
	- Pustakawan Ahli Utama	1 orang
2.	**ARSIPARIS**	
	Tingkat Terampil	
	- Arsiparis Terampil	7 orang
	- Arsiparis Mahir	4 orang
	- Arsiparis Penyelia	4 orang
	Tingkat Keahlian	
	- Arsiparis Ahli Pertama	9 orang
	- Arsiparis Ahli Muda	12 orang
	- Arsiparis Ahli Madya	17 orang
	- Arsiparis Ahli Utama	-
3	**ANALIS KEPEGAWAIAN**	
	Tingkat Keahlian	
	-Analis SDM Aparatur Ahli Muda	2 orang
	Jumlah	96 orang

(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. Desember 2024)

2. Sarana dan Prasarana

Dalam mengoptimalkan pelayanan selain didukung oleh sumber daya manusia juga sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, namun memang sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas dan sudah cukup lama sehingga kurang mendukung apalagi di era millenial. Dari segi kuantitas maupun kualitas masih sangat kurang maka perlu pembaharuan apalagi yang terkait untuk sarparas pendukung di bidang TIK. Pelayanan kearsipan dan perpustakaan ke depan dari konvensional menuju digital sesuai dengan tuntutan masyarakat modern yang mengarah ke transformasi literasi.

Di era modern ini perpustakaan adalah merupakan lembaga yang dapat membantu masyarakat dengan mengemas ulang informasi yaitu mengadopsi berita yang benar dan menangkal berita yang hoaks sehingga informasi yang dikonsumsi masyarakat merupakan berita yang benar, faktual dan dari sumber yang resmi. Layanan perpustakaan dengan berbagai jenis harus mampu menjawab dan mengakomodir keinginan masyarakat dan memberi manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat, dan operasional kerjanya serta tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki.

Fungsi sarana dan prasarana sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sekaligus menunjang tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Sarana prasarana meliputi: Gedung kantor, Gedung Layanan Perpustakaan, Depot Arsip, kendaraan operasional, kendaraan layanan keliling, komputer, koleksi bahan pustaka, khazanah arsip dan sarana serahsimpan arsip dan perpustakaan. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang dimiliki sarana prasarana sampai dengan tahun 2024 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.5

Tabel Sarana Prasarana Di Gedung Dinas Arpus Prov.Jateng

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	
I	**BARANG TIDAK BERGERAK :**		
	I. Lokasi Jl. Setiabudi No. 201 C, Srondol Semarang.		
	1. Luas Tanah	18.107	M2
	2. Gedung Kantor	2	Unit
	3. Bangunan Depo	2	Unit
	4. Rumah Genset	3	Unit
	5. Pos Jaga	3	Unit
II	**BARANG BERGERAK :**		
	1. Sedan	2	Buah
	2. Pick up/Box	2	Buah

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	
	3. Elf	1	Buah
	4. Station wagon	11	Buah
	5. Sepeda Motor	7	Buah
III	**BARANG INVENTARIS :**		
	1. Alat-alat bengkel	25	Buah
	2. Alat-alat pertanian	9	Buah
	3. Alat kantor rumah tangga	4714	Buah
	4. Alat komunikasi/studio	224	Buah
	5. Genzet	1	Buah
	6. Roll o'pack	153	Compartemen
	7. Rak Arsip	156	Unit
	8. Lemari kayu	2	Unit
	9. Lemari Peta Gantung	25	Unit
	10. Lemari Peta Vertikal	5	Unit
	11. Lemari Peta Horizontal	8	Unit

(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. tahun 2024)

Tabel 2.6
Peralatan Digitalisasi Arsip Di Gedung Dinas Arpus Prov.Jateng

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
1	Plotter (Scan Ukuran 2 X A0)	1	buah
2	Supra Scan (Scan Ukuran Ao)	1	buah
3	Scan A3	4	buah
4	Scan A4	2	buah
5	Komputer Multimedia	2	buah
6	Vhs Player	1	buah
7	Mini Dv Player	1	buah
8	Betamax Player	1	buah
9	Cassete Player	1	buah
10	DVD Player	1	buah
11	TV	1	buah
12	Monitor	3	buah
13	Printer	3	buah
14	PC Komputer	4	buah

(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. tahun 2024)

Tabel 2.7
Peralatan Laminasi Arsip Di Gedung Dinas Arpus Prov.Jateng

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
1	Meja Laminasi Kaca Ukuran 1,2 X 2,5 M	1	buah
2	Rak Pengering Laminasi	3	buah
3	Alat Press Kertas	1	buah
4	Kipas Angin Besar	2	buah
5	Blender	2	buah
6	Mika Acrilic	30	buah
7	Bak Kontainer	2	buah

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	
8	Penggaris Besi	3	buah
9	Ember	2	buah
10	Bor	2	buah

(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. tahun 2024)

Tabel 2.8
Tabel Sarana Prasarana
di Gedung Layanan Perpustakaan Dinas Arpus Prov.Jateng

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	
I	**BARANG TIDAK BERGERAK**		
	Lokasi : Jl. Sriwijaya No. 29 A Semarang		
	1. Tanah	3.009	m2
	2. Bangunan Gedung Perpustakaan	3.393	m2
II	**BARANG BERGERAK :**		
	1. Kendaraan Operasional	3	buah
	2. Mobil Unit Perpusling	7	buah
	3. Gerobak/kereta buku	2	buah
	4. Motor (roda 2 dan 3)	4	buah
	5. Lift	1	buah
III	**BARANG INVENTARIS :**		
	1. Meja	75	buah
	2. Tape recorder	3	buah
	3. Buku perpustakaan	388.596	eksemplar
	4. Kursi	321	buah
	5. Rak kayu/besi	268	buah
	6. Komputer	64	buah
	7. Almari	49	buah
	8. Filing kabinet	22	buah
	9. AC	76	buah
	10. Genzet	3	buah

(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. tahun 2024)

Tabel 2.9a
Khasanah Arsip

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tekstual (88.560 box)	2.203.841	berkas
2	kaset suara	3379	buah
3	Video VHS	551	buah
4	Video Beta	294	buah
5	Video U Matic	78	buah
6	Video VHS & Betamax	74	buah
7	CD Alih Media	45	buah
8	Slide Rell to Rrell	74	buah
9	Slide	21.000	buah
10	Piringan Hitam	23	buah

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
11	Compact Disk (CD)	110	buah
12	Film	140	buah
13	Foto	53	Album
14	Peta	1300	buah
15	Mikro film	7	buah
16	Foto udara	2.538	lembar
17	Kearsitekturan	5.545	lembar

(Sumber : Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip s.d Desember 2024)

Tabel 2.9b
Koleksi Bahan Perpustakaan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Buku Umum	119.148 Judul	260.936 eksemplar
2	Anak	15.163 Judul	31.161 eksemplar
3	Referensi Anak	299 Judul	613 eksemplar
4	Referensi	9.451 Judul	18.946 eksemplar
5	Deposit	29.318 Judul	31.013 eksemplar
6	E-book	23.460 Judul	210.116 eksemplar
7	Braille	982 Judul	1.072 eksemplar
	Jumlah	**197.821 Judul**	**553.857 eksemplar**

(Sumber : Bidang Pengelolaan Perpustakaan s.d Desember 2024)

2. 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Arah pembangunan jangka menengah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berkewajiban memberdayakan Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan, dan dapat dilihat dalam tabel 2.10:

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*		*13*	*14*	*15*	*16*		*18*	*19*	*20*	*21*	
A	**TUJUAN**																			
1	Persentase Sistem Kearsipan yang terintegrasi	%				43.00	64	-	-	-	43.00	64	-	-	-	100.00	100	-	-	-
2	Nilai standar kepuasan pengunjung terhadap pelayanan perpustakaan	%				48.00	64	-	-	-	46.94	61,72	-	-	-	97.79	96,44	-	-	-
3	Nilai Kepuasan Masyarakat	%				34.00	59	-	-	-	36.52	66.32	-	-	-	107.41	112.41	-	-	-
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka				70.20	70.25	-	-	-	82.31	86.04	-	-	-	117.25	122.48	-	-	-
5	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai				-	-	79,09	79,24	-	-	-	86,25	85,75	-	-	-	109,05	108,22	-
6	Nilai Standar Kepuasan Pengunjung Terhadap Pelayanan Perpustakaan	Nilai				-	-	80	79,24	-	-	-	82,50	85	-	-	-	103,13	107,27	-
7	Nilai indeks kearsipan	nilai				-	-	91,31	92	-	-	-	93,45	93,99	-	-	-	102,34	102,16	-
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ★	Angka				-	-	-	-	16	-	-	-	-	15,14	-	-	-	-	107,53[1]

[1] Adanya perubahan metode perhitungan IPLM sehingga mengakibatkan perubahan target Renja Tahun 2024 menjadi 14,08, realisasi sebesar 15,14 dan persentase capaian sebesar 107,53%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*		*13*	*14*	*15*	*16*		*18*	*19*	*20*	*21*	
9	Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai				-	-	-	-	94	-	-	-	-	96,07	-	-	-	-	102,20
10	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka				-	-	-	-	73	-	-	-	-	73,38	-	-	-	-	100,52
B	**SASARAN**																			
1	Persentase Sistem Pengelolaan Kearsipan yang terintegrasi	%				44.00	64	-	-	-	44.00	64	-	-	-	100.00	100	-	-	-
2	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%				48.00	64	72,50	100	-	46.94	61.72	83,56	108,67	-	97.79	96.44	115,26	108,67	-
3	Nilai Kepuasan Masyarakat	%				40.00	60	-	-	-	45.65	61.65	-	-	-	114.13	102.75	-	-	-
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka				70.25	70.30	-	-	-	82.31	86.04	-		-	117.17	122.39	-	-	-
5	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai				-	-	79,09	79,24	-	-	-	86,25	85,75	-	-	-	109,05	108,22	-
6	Nilai pengelolaan kearsipan LKD Provinsi	Nilai				-	-	89,82	90	-	-	-	91,01	95,07	-	-	-	101,32	105,63	-
7	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai				-	-	-	-	73	-	-	-	-	73,91	-	-	-	-	101,25
8	Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi	Nilai				-	-	-	-	95,32	-	-	-	-	97,09	-	-	-	-	101,86
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka				-	-	-	-	80	-	-	-	-	85,25	-	-	-	-	106,56

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*		*13*	*14*	*15*	*16*		*18*	*19*	*20*	*21*	
10	Indeks Manajemen Risiko	Angka				-	-	-	-	3,01	-	-	-	-	2,98	-	-	-	-	104,56
C	**PROGRAM**																			
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				100	100	-	100	-	100	100	-	100		100	100	-	100	
2	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100	100	-	100	-	100	100	-	100	-	100	100	-	100	-
3	Persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan	%				25	40	-	100	-	27,14	52,86	-	106,88	-	108.56	132,15	-	106,88	-
4	Persentase ketersediaan bahan pustaka	%				29,59	32.97	-	100	-	36,76	51,75	-	101,36	-	100	156,96	-	101,36	-
5	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	%				44	64	-	-	-	44	64	-	-	-	100	64	-	-	-
6	Persentase pengelolaan arsip	%				29	60	-	-	-	36,43	70.56	-	-	-	125.62	117.6	-	-	-
7	Persentase pengunjung arsip	%				20,18	32.18	-	-	-	78,36	81.29	-	-	-	388.30	252.61	-	-	-
8	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat					-	-	-	-	80	-	-	-	-	85	-	-	-	-	106,25
9	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi					-	-	-	-	80,56	-	-	-	-	83,33	-	-	-	-	103,44

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*		*13*	*14*	*15*	*16*		*18*	*19*	*20*	*21*	
10	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca					-	-	-	-	23,08	-	-	-	-	23,08	-	-	-	-	100
11	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah					-	-	-	-	84,67	-	-	-	-	86	-	-	-	-	101,57
12	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya ★					-	-	-	-	26,32	-	-	-	-	38,15	-	-	-	-	146,90[2]
13	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK					-	-	-	-	100	-	-	-	-	178,26	-	-	-	-	178,26
14	Persentase peningkatan pengunjung arsip					-	-	-	-	19	-	-	-	-	35,60	-	-	-	-	187,37
15	Persentase arsip yang diselamatkan ★					-	-	-	-	32,96	-	-	-	-	25,97	-	-	-	-	133,38[3]
16	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan					-	-	-	-	17,5	-	-	-	-	12,50	-	-	-	-	102,

[2] Mempertimbangkan hasil pengawasan kearsipan LKD Kab/Kota tahun sebelumnya banyak yang mengalami penurunan sehingga target Renja Tahun 2024 sebesar 25,97, realisasi sebesar 38,15, dan persentase capaian sebesar 146,90%

[3] Keterbatasan sarpras alihmedia dan autentikasi sehingga target Renja Tahun 2024 sebesar 19,47, realisasi sebesar 25,97, dan persentase capaian sebesar 133,38%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*		*13*	*14*	*15*	*16*		*18*	*19*	*20*	*21*	
	pemusnahan arsip ★																			54[4]
17	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
18	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah					-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
PENYESUAIAN NOMENKLATUR SESUAI KEPMENDAGRI 050/3708																				
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%				-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
2	Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip	92,78				-	-	92,78	100	-	-	-	92,80	100	-	-	-	100,02	100	-
3	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	85,11				-	-	85,11	100	-	-	-	85,11	100	-	-	-	100	100	-
4	Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan	79				-	-	79	100	-	-	-	81,17	100	-	-	-	102,75	100	-
5	Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka	%				-	-	80,50	100	-	-	-	81,37	101,36	-	-	-	101,08	101,36	-
6	Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi	%				-	-	80	100	-	-	-	80	111,11	-	-	-	100	111,11	-

[4] Penurunan target dikarenakan Perangkat Daerah memiliki kewenangan memusnahkan asripnya sendiri yang memiliki retensi dibawah 10 tahun sehingga sehingga target Renja Tahun 2024 sebesar 12,19, realisasi sebesar 12,50, dan persentase capaian sebesar 102,54%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*		*13*	*14*	*15*	*16*		*18*	*19*	*20*	*21*	
7	Persentase Partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, Kabupaten/Kota dalam pembudayaan gemar membaca	%				-	-	50	100	-	-	-	50	100	-	-	-	100	100	-
8	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan	%				-	-	59,82	100	-	-	-	59,82	106,88	-	-	-	100	106,88	-
9	Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan	%				-	-	80	100	-	-	-	93,33	120	-	-	-	116,66	120	-

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 indikator program yang realisasi capaian s.d Tahun 2024 sesuai dengan target diantaranya Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca, Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah, dan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah.

Terdapat 8 indikator program yang mengalami surplus capaian yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi, Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah, Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya, Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK, Persentase peningkatan pengunjung arsip, Persentase arsip yang diselamatkan, dan Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip.

Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
A	Pendapatan	84.000	84.000	84.000	90.000	90.000	76.464	40.000	65.000	90.000	90.000	63.774	66.699	69.276	90.000	62.388	83,40	166,75	106,58	100	69,32	2,7	-2,82
B	Belanja																						
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah	11.512.500	12.308.000	13.276.500	14.285.000	-	5.739.207	-	-	-	-	5.267.276	-	-	-	-	91,78	-	-	-	-	0	0
2	Program Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.400.000	1.475.000	1.520.000	1.570.000	-	239.012	-	-	-	-	234.413	-	-	-	-	98,08	-	-	-	-	0	0
3	Program Pengembangan Perpustakaan	2.900.000	3.200.000	3.550.000	3.900.000	-	230.122	-	-	-	-	223.792	-	-	-	-	97,25	-	-	-	-	0	0
4	Program Pengelolaan Perpustakaan	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	-	1.749.206	-	-	-	-	1.743.806	-	-	-	-	99,69	-	-	-	-	0	0
5	Program Pembinaan, Pengembangan, Dan Pengawasan Kearsipan	1.575.000	1.635.000	1.690.000	1.750.000	-	503.579	-	-	-	-	500.631	-	-	-	-	99,41	-	-	-	-	0	0

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
6	Program Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	2.125.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	-	735.145	-	-	-	-	728.704	-	-	-	-	99,12	-	-	-	-	0	0
7	Program Layanan Dan Pemanfaatan Kearsipan	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	-	288.661	-	-	-	-	287.601	-	-	-	-	99,63	-	-	-	-	0	0
8	Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	35.790.289	-	28.816.805	29.201.471	32.565.528	32.782.796	-	28.013.794	28.823.050	31.914.896.652	31.806.111	-	97,21	98,70	98	97,02	0,99	0,94
9	Program Pembinaan Perpustakaan	-	-	-	-	8.233.500	-	2.005.916	675.059	1.085.315	16.743.127	-	1.982.706	674.428	1.084.478	16.671.957	-	98,84	99,91	99,92	99,57	3,68	3,67
10	Program Pengelolaan Arsip	-	-	-	-	1.766.845	-	727.857	475.423	746.063	780.793	-	721.227	474.586	729.528	778.116	-	99,09	99,82	97,78	99,66	0,13	0,14
11	Program Perizinan Penggunaan Arsip	-	-	-	-	-	-	185.400	-	-	-	-	185.399	-	-	-	-	100,00	-	-	-	0	0
12	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	-	-	-	-	365.804	-	-	-	-	225.589	-	-	-	-	224.875	-	-	-	-	99,68	0	0
13	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	-	-	-	-	244.616	-	-	-	-	100.698	-	-	-	-	99.638.392	-	-	-	-	98,95	0	0

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan membangun birokrasi yang baik, efesien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola kearsipan yang baik. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja birokrasi, sebagaimana table berikut :

Tabel 2.12
Perkembangan Pengelolaan Arsip di Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	Satuan	2023	2024
1	Jumlah Arsip yang masuk/ akuisisi	Berkas	28.670	2.045
2	Jumlah Arsip yang diolah	Berkas	10.067	12.321
3	Jumlah arsip yang dilestarikan	Lembar	50.011	1.501
4	SDM Kearsipan (Arsiparis)	Orang	49	53
5	Jumlah Pengunjung/pengguna arsip	Orang	4.578	10.547
6	Pengembangan Kearsipan berbasis TI (aplikasi)	Aplikasi	0	0

Tabel 2.13
Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Provinsi Jawa Tengah

No	Kategori	Satuan	2023	2024
1	Sangat memuaskan	OPD	6	11
2	Memuaskan	OPD	6	15
3	Sangat baik	OPD	12	8
4	Baik	OPD	9	5
5	Cukup	OPD	7	1
6	Kurang	OPD	-	-

Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa perkembangan pengelolaan arsip di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Meski jumlah arsip yang masuk menurun drastis pada 2024, jumlah arsip yang diolah justru meningkat. Jumlah pengunjung arsip juga melonjak lebih dari dua kali lipat. Hal ini mengindikasikan pergeseran fokus ke pengolahan dan pelayanan digital, seiring adaptasi dari metode luring ke daring pasca pandemi dan penyesuaian akibat refocusing anggaran.

Hasil pengawasan kearsipan semakin menunjukkan progres positif, jumlah OPD yang berkategori cukup berangsur

menurun dari semula 7 OPD menjadi 1 OPD. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Perpustakaan berfungsi sebagai sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, dan sumber informasi diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat (life long learning). Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terus mengembangkan fungsi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam berbagai program dan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca melalui penguatan konten literasi dan kemudahan aksesibilitas agar meningkatkan literasi masyarakat Jawa Tengah.

Adapun perkembangan perpustakaan di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Perkembangan Perpustakaan di Jawa Tengah

No	Uraian	Satuan	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan Umum Provinsi	Unit	1	1
2	Jumlah Perpustakaan Keliling Provinsi	Unit	13	18
3	Perpustakaan umum kab/kota	Unit	35	35
4	Perpustakaan desa/kelurahan	Unit	3.365	3.433
5	Perpustakaan keliling kab/kota	Unit	-	-
6	Jumlah koleksi perpustakaan provinsi	Eks	332.356	339.156
7	Jumlah koleksi ebook	Eks	207.079	210.116
8	Jumlah Pustakawan	Orang	42	41
9	Pustakawan yang sudah uji kompetensi	Orang	9	11
10	Pustakawan yang sudah tersertifikasi	Orang	51	66
11	pengunjung perpustakaan umum dan keliling	Orang	239.089	150.606
12	Pengunjung perpustakaan online	Orang	3.000.213	2.923.183

Tabel 2.15
Nilai IPLM dan TGM Jawa Tengah

No	Uraian	Satuan	2023	2024
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Jawa Tengah	Nilai	71,31	73,91
2	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah	Nilai	64,40	70,57

Melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan perpustakaan di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan dari sisi koleksi dan kualitas tenaga pustakawan. Jumlah koleksi fisik dan ebook mengalami kenaikan, begitu pula pustakawan tersertifikasi. Namun, jumlah pengunjung perpustakaan fisik menurun, dari 239.089 menjadi 150.606 orang, sementara pengunjung online tetap tinggi, menandakan pergeseran preferensi masyarakat ke layanan digital.

Tingkat kegemaran membaca masyarakat mengalami tren peningkatan dalam 2 tahun terakhir, hal ini dikarenakan semakin mudahnya masyarakat mengakses perpustakaan baik layanan onsite maupun online.

2. 4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yaitu fungsi pelayanan penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan, masih terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain adalah **:**

Tabel 2.16
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis serta jati diri daerah	Belum terintegrasinya pengelolaan arsip Perangkat daerah secara digital	Belum adanya regulasi pengelolaan arsip elektronik yang komprehensif
			Belum optimalnya kualitas SDM Kearsipan
			Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip
		Belum optimalnya Pengelolaan Informasi Kearsipan Menjadi Memori Kolektif Bangsa	Belum optimalnya penambahan dan pengembangan khazanah arsip statis

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum ada repositori digital yang terhubung antara pemerintah pusat dan daerah
			Kurangnya penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan antara pemerintah pusat dan daerah
			Masih kurangnya sarana temu kembali informasi kearsipan yang tersaji secara jaringan/ digital
2	Masih rendahnya literasi dan kegemaran membaca masyarakat		
		Masih rendahnya pemanfaatan perpustakaan	
			Masih terbatasnya dukungan sarpras literasi
			Masih terbatasnya bahan bacaan yang menarik dan berkualitas
			Belum optimalnya kualitas SDM Perpustakaan

2.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna menwujudakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif dan pengembangan potensi masyarakat melalui membaca. Factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dan pengembangan potensi masyarakat melalui membaca yaitu :

a. Permasalahan perangkat daerah yang merupakan hasil analisis

gambaran pelayanan perangkat daerah:

1) Penyelenggaraan kearsipan belum bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif;
2) Kearsipan masih belum dapat optimal dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan;
3) Ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan ;
4) Ketersediaan sumber daya penyelenggaraan kearsipan, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sumber daya kearsipan lainnya masih belum memadai.
5) Kesadaran masyarakat untuk berbudaya baca masih rendah
6) Kualitas dan kuantitas SDM Perpustakaan masih terbatas
7) Infrastruktur Perpustakaan masih kurang memadai
8) Koleksi perpustakaan masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat
9) Diversifikasi layanan perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka

b. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota
Isu strategis lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang menjadi tantangan perangkat daerah ke depan yang bersumber dari:

- Telaah Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

Arsip Nasional Republik Indonesia

ANRI dalam RPJMN 2025–2029 berperan pada Program Nasional 8 bidang kebudayaan dan Kegiatan Prioritas 6, yaitu **Transformasi Kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa serta tata kelola pemerintahan**. Fokusnya mencakup budaya tertib arsip, layanan publik kearsipan, dan Pusat Khazanah Kearsipan Nusantara, dengan indikator berupa indeks budaya tertib arsip dan indeks memori kolektif bangsa.

Sejak 2019–2023, capaian Indeks Reformasi Birokrasi ANRI menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. ANRI juga berperan sebagai supporting agency dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

Dalam Program 100 Hari Bidang Kearsipan, ANRI menetapkan lima prioritas: penyesuaian kebijakan kearsipan instansi, pengelolaan arsip dinamis, penerapan aplikasi SRIKANDI, pemenuhan SDM kearsipan, serta penyelamatan arsip. Seluruh upaya ini dilaksanakan secara kolaboratif demi memberikan nilai, hasil, dan outcome terbaik bagi bangsa.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sasaran jangka menengah Renstra Perpustakaan Nasional 2025–2029 menitikberatkan pada dua arah strategis. Pertama, penguatan budaya baca dan peningkatan literasi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui target kenaikan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), serta didukung oleh pemerataan akses layanan perpustakaan, pengayaan koleksi, pengembangan layanan digital, dan pelestarian naskah kuno Nusantara sebagai khazanah pengetahuan bangsa.

Kedua, penguatan tata kelola kelembagaan Perpusnas agar lebih prima, transparan, dan akuntabel. Sasaran ini tercermin dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi serta konsistensi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Untuk mendukungnya, Perpusnas melakukan penguatan kapasitas SDM, pengembangan sistem manajemen berbasis teknologi informasi, serta kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan fokus pada literasi masyarakat dan tata kelola kelembagaan, Perpusnas diharapkan dapat berperan lebih signifikan dalam pembangunan manusia Indonesia yang berpengetahuan, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan global. Sasaran jangka menengah ini sekaligus menjadi pijakan penting dalam mewujudkan perpustakaan sebagai instrumen strategis menuju visi Indonesia Emas 2045.

- **Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah;**

Bidang Kearsipan

Kearsipan adalah unsur penting dalam memelihara sejarah, budaya dan pengetahuan. Arsip sebagai jendela ke masa lalu, memungkinkan kita untuk memahami peristiwa-peristiwa dimasa lalu dan bagaimana kita berkembang seiring berjalanannya

waktu. Namun seperti banyak hal lainnya kearsipan juga menghadapi tantangan dan perubahan besar di era digital.

Kearsipan memainkan peran penting dalam melestarikan sejarah dan budaya bangsa dan negara. Namun di era digital kearsipan menghadapi tantangan besar dalam mengelola data yang semakin besar dan beragam. Untuk itu agar tetap relevan di masa depan harus beradaptasi dengan perubahan tekhnologi berkolaborasi memberikan pendidikan dan memiliki visi jangka panjang. Dengan upaya bersama dapat dipastikan bahwa warisan dan pengetahuan manusia tetap terjaga dan dapat diakses oleh generasi mendatang

Bidang Perpustakaan

Tantangan perpustakaan di masa depan meliputi pendanaan, SDM, dan teknologi. Sementara itu, peluangnya adalah menjadi pusat budaya dan kreatif, serta menyediakan akses informasi digital

- Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah;
  Mendasarkan hasil Analisis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), implikasi bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah digitalisasi kearsipan dan perpustakaan, pengembangan memori kolektif sebagai jati diri daerah, peningkatan literasi masyarakat, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan dan Perpustakaan
- Hasil penjaringan masukan stakeholder oleh perangkat daerah.

c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2.17
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	**Permasalahan Perangkat Daerah**	**Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah**	**Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah**			**Isu Strategis Perangkat Daerah**
			Global	**Nasional**	**Regional**	
1. Jumlah penduduk usia produktif	▪ Penyelenggaraan kearsipan belum	▪ Tingkat kesejahteraan masyarakat	▪ Risiko bencana	▪ Literasi	▪ Pendidikan ▪ Kemiskinan	▪ Digitalisasi kearsipan dan perpustakaan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
2. Kekayaan Budaya, Potensi dan Kearifan lokal yang mendukung karakter bangsa 3. Teknologi informasi dan komunikasi	komprehensif ▪ Rendahnya literasi masyarakat ▪ Belum optimalnya kualitas SDM Kearsipan dan Perpustakaan	yang belum merata ▪ Risiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim yang Meningkat	alam akibat perubahan iklim ▪ Artificial Intelligence dan Big Data	▪ Pendidikan ▪ Kemiskinan ▪ Bencana alam	▪ Literasi ▪ Bencana alam seperti banjir dan gempa bumi	▪ Pengembangan memori kolektif sebagai jati diri daerah ▪ Peningkatan literasi masyarakat ▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan dan Perpustakaan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah suatu kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang deskripsinya secara konkrit menyatakan kondisi positif membalikkan pernyataan isu strategis, permasalahan dan peluang, serta menyatakan ukuran pencapaian secara singkat, jelas dan mudah dipahami.

Sedangkan sasaran Dinas Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah rumusan suatu kondisi yang lebih operasional yang menggambarkan tercapainya tujuan yang selaras dengan tugas pokok fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah secara singkat, jelas dan mudah dipahami.

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatkan Literasi Masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis.

b. Sasaran

Sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatkan Kegemaran Membaca masyarakat Jawa Tengah;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	93,99	96,07	96,17	96,27	96,37	96,47	96,57	96,67	96,67
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan LKD Provinsi	95,07	97,09	97,19	97,29	97,39	97,49	97,59	97,69	97,69
			Persentase arsip bersejarah yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
2	Meningkatkan Literasi Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	13,67	15,14	15,45	15,76	15,99	16,32	16,73	17,16	17,16
		Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM)	71,31	73,91	75,10	76,70	78,50	80,50	83	85,60	85,60

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	75.89	73.38	73.58	73.78	73.98	74.28	74.48	74.58	74.58
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,38	85,25	85,35	85,45	85,55	85,65	85,75	85,85	85,85
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,81	2,98	3,03	3,08	3,13	3,18	3,23	3,28	3,28

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melakukan analisis melalui inventarisasi permasalahan, hambatan serta pendorong sehingga dapat menghasilkan strategi dan arah kebijakan yang tepat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/focus, konkrit dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan Arah kebijakan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dalam mendukung Visi Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mendukung pencapaian Misi ke-1: Meningkatka layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global; Misi ke-3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas ; dan Misi ke-5: Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya local, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan. Selain itu perumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan cascading dan pohon kinerja yang sudah disusun, dan selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Literasi Masyarakat	Meningkatkan minat baca (kegemaran membaca) masyarakat Jawa Tengah	1. Peningkatan tata kelola perpustakaan	1. Pemetaaan tingkat literasi masyarakat 2. Pemetaan kebutuhan layanan perpustakaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			umum Provinsi Jawa Tengah 3. Peningkatan kualitas SDM Perpustakaan 4. Penguatan kerjasama/kemitraan dgn stakeholder 5. Pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca 6. Penguatan ekosistem literasi
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah	1. Penguatan kebijakan dan tata kelola kearsipan 2. Penguatan digitalisasi arsip	1. Pemetaan kebutuhan penyelenggaraan digitalisasi arsip 2. Peningkatan kualitas SDM kearsipan 3. Peningkatan pengawasan kearsipan internal 4. Inventarisasi arsip kearifan lokal 5. Peningkatan pelestarian arsip budaya dan sejarah lokal 6. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kearsipan kepada masyarakat 7. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder kearsipan

Tahapan pembanguan setiap tahunnya sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan tata kelola transformasi digital kearsipan dan literasi	Peningkatan kemitraan/kerjasama dengan *stakeholder* kearsipan dan perpustakaan	Perluasan literasi dan optimalisasi penyelenggaraan kearsipan	Pemantapan sarpras dan kualitas SDM kearsipan dan perpustakaan yang berdaya saing	Perwujudan budaya literasi masyarakat yang maju dan penyelenggaraan kearsipan yang berkelanjutan

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	16	Penetapan Standar Pelayanan belum memenuhi kriteria	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurun	Melaksanakan monev pelaksanaan Standar Pelayanan dan pengembangan jenis layanan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat	Kepala Dinas	Setiap Tahun
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Kurangnya efektivitas manajemen risiko di instansi	12	Perubahan kebijakan atau regulasi terkait pengelolaan risiko secara mendadak	Ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan proses manajemen risiko yang berjalan	Mengidentifikasi risiko, mengendalikan dan memantau efektivitas pengendalian risiko	Kepala Dinas	Setiap Tahun
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan LKD Provinsi	Aspek pengelolaan arsip belum sesuai NSPK	16	1. Belum semua Pedoman Kearsipan di level daerah sesuai dengan level di atasnya 2. Sarpras pengolahan arsip dinamis inaktif dan	Pengolahan arsip tidak maksimal	1. Merevisi Pedoman Kerasipan Daerah 2. Pemenuhan sarpras kearsipan sesuai NSPK	Kepala Dinas	Setiap tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
				statis belum memadai				
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Persentase arsip bersejarah yg ditetapkan sebagai MKB	Arsip bersejarah yang diajukan tidak teregister sebagai MKB	16	Sebagian data pelengkap bukan merupakan kewenangan/hak milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Arsip bersejarah tidak teregister sebagai MKB sehingga pemanfaatannya terbatas	1. Koordinasi dengan pemilik sumber informasi, baik masyarakat maupun instansi/lembaga pemerintah yang lain 2. Melakukan penelusuran arsip sesuai tema yang diajukan Memori Kolektif Bangsa	Kepala Dinas	Setiap Tahun
Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Masyarakat tidak berminat membaca buku	16	Kebijakan pemenuhan koleksi bahan perpustakaan telah ada namun belum menjadi prioritas	Tingkat kegemaran membaca masyarakat rendah	Melakukan penambahan koleksi bahan pustaka yang uo to date dan sesuai kebutuhan masyarakat serta memfasilitasi untuk peningkatan budaya gemar membaca	Kepala Dinas	Setiap Tahun

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah *												1.050.000.000		1.417.000.000		1.774.500.000		2.220.873.000		2.779.088.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
							Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah *	Angka	96,07	96,17	96,27		96,37		96,47		96,57		96,67		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya kualitas											1.050.000.000		1.417.000.000		1.774.500.000		2.220.873.000		2.779.088.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah **																					
							Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	Angka	97,09	97,19	97,29	750.000.000	97,39	1.041.000.000	97,49	1.304.500.000	97,59	1.632.873.000	97,69	2.043.088.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP ***									455.000.000		573.000.000		717.750.000		898.687.000		1.123.858.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi, Perangkat Daerah dan LKD Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/ kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya ***	%	38,15	42,1	44,74	455.000.000	47,37	573.000.000	50	717.750.000	52,63	898.687.000	55,26	1.123.858.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
		2.24.02.1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi ****								455.000.000		573.000.000		717.750.000		898.687.000		1.123.858.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
						Terlaksananya pengawasan kearsipan LKD Provinsi, Perangkat	Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai	Lembaga	29	32	34	200.000.000	36	250.000.000	38	313.000.000	40	392.000.000	41	490.000.000	Pokja Pengawasan Kearsipan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Daerah dan LKD Kab/Kota	pengawasan kearsipannya minimal baik ****															
		2.24.02.1.01.0012			Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi *****							200.000.000		250.000.000		313.000.000		392.000.000		490.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
						Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan *****	Lembaga	76	117	117	200.000.000	117	250.000.000	117	313.000.000	117	392.000.000	117	490.000.000	Pokja Pengawasan Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Pembinaan kearsipan pada OPD, BUMD, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik	Jumlah OPD, BUMD, Ormas, Orpol yang mendapatkan pembinaan kearsipan ****	Instansi	47	51	51	250.000.000	51	313.000.000	51	392.000.000	51	490.000.000	51	613.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	
		2.24.02.1.01.0008			Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi *****							250.000.000		313.000.000		392.000.000		490.000.000		613.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
						Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis *****	Instansi	47	51	51	250.000.000	51	313.000.000	51	392.000.000	51	490.000.000	51	613.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																						Kearsipan
						Terlaksananya pengembangan kapasitas arsiparis di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah ****	Orang	N/A	5	5	5.000.000	5	10.000.000	5	12.750.000	5	16.687.000	5	20.858.000	Pokja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	
		2.24.02.1.01.0009			Penyusunan Database Arsiparis *****							5.000.000		10.000.000		12.750.000		16.687.000		20.858.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
						Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis *****	Dokumen	N/A	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	12.750.000	1	16.687.000	1	20.858.000	Pokja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																						dan Pengawasan Kearsipan
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP ***									245.000.000		405.000.000		507.500.000		635.124.000		794.403.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
						Meningkatnya Kelestarian Arsip Statis sebagai Memori Kolektif Bangsa	Persentase pengelolaan arsip statis provinsi ***	%	66,82	73,12	79,15	245.000.000	85,17	405.000.000	91,19	507.500.000	97,22	635.124.000	100	794.403.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
		2.24.02.1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi ****								245.000.000		405.000.000		507.500.000		635.124.000		794.403.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
						Terkelolanya khazanah	Jumlah arsip statis	Arsip	122012	134012	146012	245.0	158012	405.0	170012	507.5	182012	635.1	194012	794.4	Pokja Pengolahan Arsip	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						arsip statis provinsi	yang terkelola ****					00.000		00.000		00.000		24.000		03.000		
		2.24.02.1.02.0003			Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan *****							20.000.000		30.000.000		38.250.000		47.812.000		59.765.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
						Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai *****	Orang	N/A	2	2	20.000.000	2	30.000.000	2	38.250.000	2	47.812.000	2	59.765.000	Pokja Pengolahan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
		2.24.02.1.02.0005			Akuisisi Arsip Statis *****							75.000.000		125.000.000		156.750.000		196.437.000		245.545.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksanya Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi *****	Arsip	2297	1500	1500	75.000.000	1500	125.000.000	1500	156.750.000	1500	196.437.000	1500	245.545.000	Pokja Pengolahan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
		2.24.02.1.02.0006			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis *****							150.000.000		250.000.000		312.500.000		390.875.000		489.093.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
						terlaksanya akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi *****	Arsip	13828	13500	1350	150.000.000	1350	250.000.000	1350	312.500.000	1350	390.875.000	1350	489.093.000	Pokja Pengolahan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP ***									50.000.000		63.000.000		79.250.000		99.062.000		124.827.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
						Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis ***	%	47,6	57,14	66,67	15.000.000	76,19	19.000.000	85,71	24.000.000	95,24	30.000.000	100	38.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
		2.24.03.1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah								15.000.000		19.000.000		24.000.000		30.000.000		38.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun ****																		
						Terlaksananya pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 thn ****	Arsip	12260	10000	10000	15.000.000	10000	19.000.000	10000	24.000.000	10000	30.000.000	10000	38.000.000	Pokja Akuisisi Arsip	
		2.24.03.1.01.0004			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusna							15.000.000		19.000.000		24.000.000		30.000.000		38.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					han Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun *****																dan Pelestarian Arsip	
						Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun *****	Arsip	12260	10000	10000	15.000.000	10000	19.000.000	10000	24.000.000	10000	30.000.000	10000	38.000.000	Pokja Akuisisi Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
						Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pemulihan arsip akibat bencana ***	%	8,34	14,34	20,34	15.000.000	26,34	19.000.000	32,34	24.000.000	38,34	30.000.000	44,34	38.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.24.03.1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi ****								15.000.000		19.000.000		24.000.000		30.000.000		38.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
						Terlaksananya Kegiatan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana ****	Arsip	834	1434	2034	15.000.000	2634	19.000.000	3234	24.000.000	3834	30.000.000	4434	38.000.000	Pokja Pelestarian Arsip	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.24.03.1.02.0001			Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana *****							15.000.000		19.000.000		24.000.000		30.000.000		38.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
						Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana *****	Arsip	400	600	600	15.000.000	600	19.000.000	600	24.000.000	600	30.000.000	600	38.000.000	Pokja Pelestarian Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
						Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan melalui alih media ***	%	5,95	10,74	11,4	20.000.000	11,76	25.000.000	12,58	31.250.000	12,99	39.062.000	13,65	48.827.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.24.03.1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi ****								20.000.000		25.000.000		31.250.000		39.062.000		48.827.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
						Terlaksanaanya Kegiatan Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan provinsi	Jumlah Arsip yang dialih-mediakan ****	Arsip	5305	5875	6545	20.000.000	7315	25.000.000	8235	31.250.000	9305	39.062.000	10575	48.827.000	Pokja Pelestarian Arsip	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.24.03.1.04.0002			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip *****							20.000.000		25.000.000		31.250.000		39.062.000		48.827.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
						Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip *****	Arsip	305	570	670	20.000.000	770	25.000.000	920	31.250.000	1070	39.062.000	1270	48.827.000	Pokja Pelestarian Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							Persentase arsip bersejarah yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) **	%	30	40	50	300.000.000	60	376.000.000	70	470.000.000	80	588.000.000	90	736.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP ***									300.000.000		376.000.000		470.000.000		588.000.000		736.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
						Meningkatnya Kualitas Layanan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ***	Angka	85,5	85,6	85,7	300.000.000	85,8	376.000.000	85,9	470.000.000	86	588.000.000	86,1	736.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
		2.24.02.1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem								300.000.000		376.000.000		470.000.000		588.000.000		736.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi ****																		
						Terlaksananya layanan arsip statis LKD Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Arsip yang terlayankan ****	Arsip	970	1000	1000	150.000.000	1000	188.000.000	1000	235.000.000	1000	294.000.000	1000	368.000.000	Pokja Layanan Arsip	
		2.24.02.1.03.0001			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN *****							150.000.000		188.000.000		235.000.000		294.000.000		368.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
						Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan	Pengguna	3681	3250	3500	150.000.000	3600	188.000.000	3700	235.000.000	3800	294.000.000	3800	368.000.000	Pokja Layanan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN *****																dan Pemanfaatan Arsip
						Meningkatnya partisipasi Unit Kearsipan Perangkat Daerah dan LKD	Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip ****	Unit	41	41	41	150.000.000	41	188.000.000	41	235.000.000	41	294.000.000	41	368.000.000	Pokja Pemanfaatan Arsip	
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi *****								150.000.000		188.000.000		235.000.000		294.000.000		368.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi *****	Laporan	4	4	4	150.000.000	4	188.000.000	4	235.000.000	4	294.000.000	4	368.000.000	Pokja Pemanfaatan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
Meningkatkan literasi masyarakat *												2.120.000.000		2.543.250.000		2.799.110.000		3.533.384.000		4.418.154.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
							Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) *	Angka	15,14	15,45	15,76		15,99		16,32		16,73		17,16		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat **											2.120.000.000		2.543.250.000		2.799.110.000		3.533.384.000		4.418.154.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM) **	Angka	73,91	75,1	76,7	2.120.000.000	78,5	2.543.250.000	80,5	2.799.110.000	83	3.533.384.000	85,6	4.418.154.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN ***									835.000.000		1.052.000.000		1.224.100.000		1.532.125.000		1.916.655.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	
						Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) ***	%	43,49	44,38	45,27	835.000.000	46,15	1.052.000.000	47,04	1.224.100.000	47,93	1.532.125.000	48,82	1.916.655.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daera								305.000.000		388.000.000		487.500.000		611.375.000		765.718.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				h Provinsi ****																		
						Terlaksanya penyelenggaraan perpustakaan sesuai SNP yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi ****	Perpustakaan	5	3	4	200.000.000	4	250.000.000	4	314.000.000	4	394.000.000	4	494.000.000	Pokja Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	
		2.23.02.1.01.0016			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan *****							100.000.000		125.000.000		157.000.000		197.000.000		247.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	
						Terlaksanya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan *****	Dokumen	1	1	1	100.000.000	1	125.000.000	1	157.000.000	1	197.000.000	1	247.000.000	Pokja Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.23.02.1.01.0017			Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi *****							100.000.000		125.000.000		157.000.000		197.000.000		247.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	
						Terlaksanya Pembinaan Perpustakaan umum dan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan *****	Perpustakaan	4	8	10	100.000.000	15	125.000.000	20	157.000.000	20	197.000.000	20	247.000.000	Pokja Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan
						Terlaksanya penyelenggaraan perpustakaan sesuai	Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi ****	Orang	15	20	25	75.000.000	30	100.000.000	30	125.500.000	30	157.375.000	30	196.718.000	Pokja Pembinaan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						SNP yang menjadi kewenangan Provinsi																
		2.23.02.1.01.0006			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi *****							75.000.000		100.000.000		125.500.000		157.375.000		196.718.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	
						Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	Orang	15	25	30	75.000.000	35	100.000.000	35	125.500.000	35	157.375.000	35	196.718.000	Pokja Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							Provinsi *****															
						Terlaksananya penyelenggaraan perpustakaan sesuai SNP yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Perpustakaan Sekolah sesuai kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya sesuai SNP ****	Perpustakaan	250	260	270	30.000.000	285	38.000.000	305	48.000.000	330	60.000.000	360	75.000.000	Pokja Pembinaan Perpustakaan	
		2.23.02.1.01.0004			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi							30.000.000		38.000.000		48.000.000		60.000.000		75.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan *****																	
						Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan *****	Perpustakaan	7	10	10	30.000.000	15	38.000.000	20	48.000.000	25	60.000.000	30	75.000.000	Pokja Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi ****								530.000.000		664.000.000		736.600.000		920.750.000		1.150.937.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	
						Meningkatnya pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus ****	Kegiatan	2	2	2	30.000.000	2	38.000.000	2	48.000.000	2	60.000.000	2	75.000.000	Pokja Kegemaran Membaca	
		2.23.02.1.02.0001			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah							30.000.000		38.000.000		48.000.000		60.000.000		75.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat *****																	
						Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus *****	Lokus	3	13	13	30.000.000	13	38.000.000	13	48.000.000	13	60.000.000	13	75.000.000	Pokja Kegemaran Membaca	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan
						Meningkatnya pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah dan khusus serta	Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat ****	Kegiatan	2	2	2	500.000.000	2	626.000.000	2	688.600.000	2	860.750.000	2	1.075.937.000	Pokja Kegemaran Membaca	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						masyarakat																
		2.23.02.1.02.0003			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca *****							350.000.000		438.000.000		481.800.000		602.250.000		752.812.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	
						Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca *****	Orang	8	12	12	350.000.000	12	438.000.000	12	481.800.000	12	602.250.000	12	752.812.000	Pokja Kegemaran Membaca	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan
		2.23.02.1.02.0006			Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi *****							150.000.000		188.000.000		206.800.000		258.500.000		323.125.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya *****	Orang	1	1	1	150.000.000	1	188.000.000	1	206.800.000	1	258.500.000	1	323.125.000	Pokja Kegemaran Membaca	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN ***									1.140.000.000		1.308.500.000		1.371.487.000		1.746.858.000		2.183.501.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
						Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ***	Angka	85	85,1	85,2	1.140.000.000	85,3	1.308.500.000	85,4	1.371.487.000	85,5	1.746.858.000	85,6	2.183.501.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi ****								690.000.000		808.500.000		846.487.000		1.090.608.000		1.363.189.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
						Meningkatnya ketercukupan koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ****	%	5	3	3	550.000.000	3	632.500.000	3	650.000.000	3	845.000.000	3	1.056.250.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	
		2.23.02.1.01.0009			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka *****							550.000.000		632.500.000		650.000.000		845.000.000		1.056.250.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan *****	Eksemplar	11588	5942	6120	550.000.000	6304	632.500.000	6493	650.000.000	6688	845.000.000	6888	1.056.250.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Bidang Pengelolaan Perpustakaan
						Meningkatnya jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ****	Jenis	8	10	12	125.000.000	14	156.750.000	16	172.425.000	18	215.531.000	20	269.343.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
		2.23.02.1.01.0002			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi *****							75.000.000		94.000.000		103.400.000		129.250.000		161.562.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksanya Pengembangan Perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya *****	Perpustakaan	6	6	6	75.000.000	6	94.000.000	6	103.400.000	6	129.250.000	6	161.562.000	Pokja Layanan dan Otomasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
		2.23.02.1.01.0015			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik *****							50.000.000		62.750.000		69.025.000		86.281.000		107.781.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
						Terlaksanya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihar	Perpustakaan	1	1	1	50.000.000	1	62.750.000	1	69.025.000	1	86.281.000	1	107.781.000	Pokja Layanan dan Otomasi	Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	a dengan Manajemen Layanan TIK *****																
						Meningkatnya pemanfaatan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ****	Orang	3073789	3120000	3166650	15.000.000	3214300	19.250.000	3262650	24.062.000	3311500	30.077.000	3361050	37.596.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
		2.23.02.1.01.0011			Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat *****							15.000.000		19.250.000		24.062.000		30.077.000		37.596.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
						Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat *****	Dokumen	N/A	1	1	15.000.000	1	19.250.000	1	24.062.000	1	30.077.000	1	37.596.000	Pokja Layanan dan Otomasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi ****								450.000.000		500.000.000		525.000.000		656.250.000		820.312.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
						Meningkatnya pembudayaan gemar membaca	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan TPBIS yang diselenggarakan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ****	Orang	1059	1060	1070	450.000.000	1080	500.000.000	1090	525.000.000	1100	656.250.000	1110	820.312.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
		2.23.02.1.02.0004			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial *****							450.000.000		500.000.000		525.000.000		656.250.000		820.312.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksanya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan *****	Perpustakaan	1	1	1	450.000.000	1	500.000.000	1	525.000.000	1	656.250.000	1	820.312.000	Pokja Layanan dan Otomasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO ***									145.000.000		182.750.000		203.523.000		254.401.000		317.998.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
						Meningkatnya koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan Provinsi	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpusta	%	6,92	9,27	9,43	145.000.000	9,65	182.750.000	9,9	203.523.000	10,15	254.401.000	10,39	317.998.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Jawa Tengah	kaan umum Provinsi Jawa Tengah ***																
		2.23.03.1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Kolek si Daera h di Daera h Provi nsi ****								65.000.000		81.500.000		89.649.000		112.060.000		140.074.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
						Terlaksanaanya tertib serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ****	Penerbit	78	83	88	65.000.000	93	81.500.000	98	89.649.000	103	112.060.000	108	140.074.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.23.03.1.01.0001			Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam *****							15.000.000		19.000.000		20.899.000		26.123.000		32.653.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
						Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR *****	Eksemplar	3038	3000	3400	15.000.000	3800	19.000.000	4200	20.899.000	4700	26.123.000	5400	32.653.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.23.03.1.01.0002			Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam *****							50.000.000		62.500.000		68.750.000		85.937.000		107.421.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
						Terlaksanaanya Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan	Penerbit	3	6	6	50.000.000	6	62.500.000	6	68.750.000	6	85.937.000	6	107.421.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Karya Cetak dan Karya Rekam *****															
		2.23.03.1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah ****								40.000.000		50.000.000		57.500.000		71.874.000		89.841.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
						Terlaksananya inventarisasi koleksi daerah dan bibliografi Daerah	Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan ****	Dokumen	2	2	2	40.000.000	2	50.000.000	2	57.500.000	2	71.874.000	2	89.841.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.02.0001			Penerbitan Katalog Induk Daerah *****							20.000.000		25.000.000		31.250.000		39.062.000		48.827.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																					Pengelolaan Perpustakaan	
						Terlaksananya Penerbitan Katalog Induk Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan *****	Entry	4350	4500	5000	20.000.000	5600	25.000.000	6300	31.250.000	7100	39.062.000	8000	48.827.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
		2.23.03.1.02.0002			Penerbitan Bibliografi Daerah *****							20.000.000		25.000.000		26.250.000		32.812.000		41.014.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
						Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah Provinsi	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan *****	Naskah	1	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	26.250.000	1	32.812.000	1	41.014.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
		2.23.03.1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik								15.000.000		18.750.000		20.624.000		25.780.000		32.225.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Daerah Provinsi ****																	Pengelolaan Perpustakaan	
						Meningkatnya jumlah koleksi naskah kuno yang dilestarikan di Jawa Tengah	Jumlah koleksi naskah kuno di Jawa Tengah yang dialih-mediakan ****	Eksemplar	258	263	269	15.000.000	276	18.750.000	284	20.624.000	293	25.780.000	303	32.225.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.03.0003			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan *****							15.000.000		18.750.000		20.624.000		25.780.000		32.225.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan *****	Eksemplar	3	5	6	15.000.000	7	18.750.000	8	20.624.000	9	25.780.000	10	32.225.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
		2.23.03.1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerinta								25.000.000		32.500.000		35.750.000		44.687.000		55.858.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				h Daerah Provinsi ****																		
						Meningkatnya jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah ****	Eksemplar	374	394	415	25.000.000	437	32.500.000	460	35.750.000	484	44.687.000	509	55.858.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.04.0001			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara *****							10.000.000		12.500.000		13.750.000		17.187.000		21.483.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
						Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan	Eksemplar	174	20	21	10.000.000	22	12.500.000	23	13.750.000	24	17.187.000	25	21.483.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tingkat Provinsi	Daerah Tingkat Provinsi *****															
		2.23.03.1.04.0002			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara *****							15.000.000		20.000.000		22.000.000		27.500.000		34.375.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
						Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi *****	Eksemplar	174	20	21	15.000.000	22	20.000.000	23	22.000.000	24	27.500.000	25	34.375.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan *												34.159.549.000		36.742.595.000		37.006.263.000		58.008.011.000		53.978.140.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan *	Angka	73,38	73,58	73,78		73,98		74,28		74,48		74,58		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Kearsi											661.000.000		727.650.000		731.125.000		840.793.000		966.910.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	pan dan Perpustakaan **																					
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan **	Angka	2,98	3,03	3,08	661.000.000	3,13	727.650.000	3,18	731.125.000	3,23	840.793.000	3,28	966.910.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***									661.000.000		727.650.000		731.125.000		840.793.000		966.910.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangka	%	100	100	100	661.000.000	100	727.650.000	100	731.125.000	100	840.793.000	100	966.910.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	t daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ***																
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****								661.000.000		727.650.000		731.125.000		840.793.000		966.910.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	100	661.000.000	100	727.650.000	100	731.125.000	100	840.793.000	100	966.910.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****							600.000.000		660.000.000		660.000.000		759.000.000		872.850.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	3	6	5	600.000.000	5	660.000.000	5	660.000.000	6	759.000.000	5	872.850.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****							50.000.000		55.000.000		57.125.000		65.693.000		75.546.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Terlaksanany a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	5	5	5	50.000.000	5	55.000.000	5	57.125.000	5	65.693.000	5	75.546.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****							5.500.000		6.325.000		7.000.000		8.050.000		9.257.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksanya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	67	67	67	5.500.000	67	6.325.000	67	7.000.000	67	8.050.000	67	9.257.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****							5.500.000		6.325.000		7.000.000		8.050.000		9.257.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	1	1	1	5.500.000	1	6.325.000	1	7.000.000	1	8.050.000	1	9.257.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan **											33.498.549.000		36.014.945.000		36.275.138.000		57.167.218.000		53.011.230.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan **	Angka	85,25	85,35	85,45	33.498.549.000	85,55	36.014.945.000	85,65	36.275.138.000	85,75	57.167.218.000	85,85	53.011.230.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN									33.498.549.000		36.014.945.000		36.275.138.000		57.167.218.000		53.011.230.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***																			
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ***	%	100	100	100	33.498.549.000	100	36.014.945.000	100	36.275.138.000	100	57.167.218.000	100	53.011.230.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****								25.612.743.000		28.124.017.000		29.510.717.000		33.937.324.000		39.027.922.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	1	1	1	25.612.743.000	1	28.124.017.000	1	29.510.717.000	1	33.937.324.000	1	39.027.922.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							25.212.743.000		27.734.017.000		29.120.717.000		33.488.824.000		38.512.147.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	148	147	147	25.212.743.000	147	27.734.017.000	147	29.120.717.000	147	33.488.824.000	147	38.512.147.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							400.000.000		390.000.000		390.000.000		448.500.000		515.775.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersedianya Administrasi Pelaksana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokumen	1	1	1	400.000.000	1	390.000.000	1	390.000.000	1	448.500.000	1	515.775.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						an Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****																
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****								110.000.000		121.000.000		126.500.000		132.825.000		139.465.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	1	110.000.000	1	121.000.000	1	126.500.000	1	132.825.000	1	139.465.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang							10.000.000		11.000.000		11.000.000		11.550.000		12.127.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Milik Daerah SKPD *****																	
						Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.550.000	1	12.127.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****							100.000.000		110.000.000		115.500.000		121.275.000		127.338.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	115.500.000	1	121.275.000	1	127.338.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****								70.000.000		80.500.000		80.500.000		84.525.000		88.749.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	100	70.000.000	100	80.500.000	100	80.500.000	100	84.525.000	100	88.749.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****							10.000.000		11.500.000		11.500.000		12.075.000		12.678.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	11.500.000	1	11.500.000	1	12.075.000	1	12.678.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian							10.000.000		11.500.000		11.500.000		12.075.000		12.678.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Kinerja Pegawai *****																	
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	11.500.000	1	11.500.000	1	12.075.000	1	12.678.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****							50.000.000		57.500.000		57.500.000		60.375.000		63.393.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	5	5	20	50.000.000	20	57.500.000	20	57.500.000	25	60.375.000	25	63.393.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****								1.010.000.000		1.167.750.000		1.289.262.000		1.500.656.000		1.747.351.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	100	1.010.000.000	100	1.167.750.000	100	1.289.262.000	100	1.500.656.000	100	1.747.351.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****							75.000.000		86.250.000		99.187.000		114.065.000		131.174.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Paket	1	1	1	75.000.000	1	86.250.000	1	99.187.000	1	114.065.000	1	131.174.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Bangunan Kantor	n Bangunan Kantor yang Disediakan *****															
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							120.000.000		138.000.000		138.000.000		158.700.000		182.505.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	120.000.000	1	138.000.000	1	138.000.000	1	158.700.000	1	182.505.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****							50.000.000		57.500.000		66.125.000		76.049.000		87.456.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	1	1	1	50.000.000	1	57.500.000	1	66.125.000	1	76.049.000	1	87.456.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							Disediakan *****															
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****							200.000.000		230.000.000		253.000.000		290.950.000		334.592.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	5	200.000.000	5	230.000.000	5	253.000.000	5	290.950.000	5	334.592.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****							20.000.000		23.000.000		26.450.000		30.417.000		34.979.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	1	20.000.000	1	23.000.000	1	26.450.000	1	30.417.000	1	34.979.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan							20.000.000		23.000.000		23.000.000		26.450.000		30.417.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					g-Undangan *****																	
						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	1	1	1	20.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	26.450.000	1	30.417.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****							150.000.000		172.500.000		172.500.000		198.375.000		228.131.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	1	150.000.000	1	172.500.000	1	172.500.000	1	198.375.000	1	228.131.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****							250.000.000		300.000.000		360.000.000		432.000.000		518.400.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	1	250.000.000	1	300.000.000	1	360.000.000	1	432.000.000	1	518.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****							25.000.000		27.500.000		30.000.000		34.500.000		39.675.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Terlaksanya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	1	1	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.000.000	1	34.500.000	1	39.675.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****							100.000.000		110.000.000		121.000.000		139.150.000		160.022.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksanany a Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	1	1	2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	2	139.150.000	2	160.022.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****								1.816.000.000		377.538.000		0		15.917.283.000		6.060.886.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersediany a barang milik daerah penunjang urusan pemerinta	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan	Unit	20	8	47	1.816.000.000	59	377.538.000	51	0	51	15.917.283.000	35	6.060.886.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						h daerah yang memiliki nilai aset	pemerintah daerah yang disediakan ****															
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							0		0		0		1.200.000.000		0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	1.200.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel *****							0		377.538.000		0		377.539.000		0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	N/A	N/A	0	1	377.538.000	N/A	0	1	377.539.000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan							564.0		0		0		13.33		6.060	Dinas Kearsipan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					dan Mesin Lainnya *****							00.000						9.744.000		.886.000	dan Perpustakaan	
						Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	20	8	21	564.000.000	N/A	0	N/A	0	39	13.339.744.000	30	6.060.886.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							1.252.000.000		0		0		1.000.000.000		0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	13	1.252.000.000	N/A	0	N/A	0	20	1.000.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****								3.603.000.000		3.998.450.000		4.302.705.000		4.518.641.000		4.745.323.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1	1	1	3.603.000.000	1	3.998.450.000	1	4.302.705.000	1	4.518.641.000	1	4.745.323.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****							3.000.000		3.450.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	1	3.000.000	1	3.450.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****							1.300.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.417.500.000		1.488.375.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	1.300.000.000	1	1.350.000.000	1	1.350.000.000	1	1.417.500.000	1	1.488.375.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****							100.000.000		115.000.000		126.500.000		132.825.000		139.466.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka	Laporan	1	1	1	100.000.000	1	115.000.000	1	126.500.000	1	132.825.000	1	139.466.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							pan Kantor yang Disediakan *****															
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****							2.200.000.000		2.530.000.000		2.822.205.000		2.963.316.000		3.111.482.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1	2.200.000.000	1	2.530.000.000	1	2.822.205.000	1	2.963.316.000	1	3.111.482.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan								1.276.806.000		2.145.690.000		965.454.000		1.075.964.000		1.201.534.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Daerah ****																		
						Tersediannya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	180	83	155	1.276.806.000	156	2.145.690.000	156	965.454.000	161	1.075.964.000	161	1.201.534.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****							30.000.000		34.500.000		39.675.000		41.658.000		43.740.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharaa dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	2	2	2	30.000.000	2	34.500.000	2	39.675.000	2	41.658.000	2	43.740.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****							150.000.000		172.500.000		140.159.000		147.166.000		153.841.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	15	15	23	150.000.000	23	172.500.000	23	140.159.000	23	147.166.000	23	153.841.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						aan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****																
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel *****							10.000.000		11.500.000		13.225.000		13.886.000		14.580.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Terlaksanany a Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipeliharaa *****	Unit	1	1	15	10.000.000	15	11.500.000	20	13.225.000	20	13.886.000	25	14.580.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							150.000.000		150.000.000		150.000.000		157.500.000		165.375.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Terlaksanany a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharaa *****	Unit	90	55	105	150.000.000	105	150.000.000	110	150.000.000	110	157.500.000	110	165.375.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan							343.606.000		1.040.000.000		100.000.000		0		0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					Bangunan Lainnya *****																	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharaa/Direhabilitasi *****	Unit	3	1	4	343.606.000	2	1.040.000.000	1	100.000.000	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							150.000.000		162.500.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	4	9	2	150.000.000	2	162.500.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Baseline Tahun 2025 (Target)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											2026		2027		2028		2029		2030			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****															
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****							443.200.000		574.690.000		422.395.000		615.754.000		723.998.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	63	443.200.000	63	574.690.000	60	422.395.000	63	615.754.000	63	723.998.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tabel 4.2

Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output/ Target/Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Digitalisasi Manajemen Arsip	**A. Penyusunan regulasi manajemen arsip**				
		1. Penyusunan Regulasi pengelolaan Arsip Elektronik	2 Peraturan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
		2. Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan Arsip Statis melalui Sistem Arsip Statis (SiArtis) kepada OPD dan LKD Kabupaten/ Kota	78 Orang Pengelola Arsip			
		3. Sosialisasi dan Pembinaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) kepada SMA, SMK, SLB, UPT dan Cabang Dinas) (13 cabdin)	640 Orang Pengelola Arsip			
		B. Pembuatan Digital Arsip terintegrasi				
		1. Pengembangan Sistem Arsip Statis (SiArtis)	1 Sistem Aplikasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Subbagian Umum dan Kepegawaian	

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output/ Target/Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
		2. Pengolahan dan Akses Arsip Statis	67.500 Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip 2. Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		
				Sub Kegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		
		3. Alihmedia Arsip Statis	4700 Arsip	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi		
				Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		
		4. Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan	400 Orang Pengelola Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		
				Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi		
		C. Penyediaan sarpras manajemen digitalisasi kearsipan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
		Mebel	143 buah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Peralatan dan Mesin Lainnya	63 unit/ buah			
		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 unit/buah			

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output/ Target/Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket			

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Mengacu pada Visi Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, **“Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”,** maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian **Misi ke-1**: **Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global; Misi ke-3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas** ; **dan Misi ke-5: Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya local, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan.**

Guna pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah tersebut, ditetapkan indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mendukung sasaran daerah, yaitu:

1. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan;
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM);
3. Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah).

Adapun program yang dilaksakanakan untuk pencapaian indikator kinerja utama adalah 5 program utama yaitu:

1. Program Pengelolaan Arsip;
2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;
3. Program Pembinaan Perpustakaan;
4. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Target capaian masing masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat ditampilkan pada tabel 4.3 :

Table 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	93,99	96,07	96,17	96,27	96,37	96,47	96,57	96,67	
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan LKD Provinsi	95,07	97,09	97,19	97,29	97,39	97,49	97,59	97,69	
Persentase arsip bersejarah yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	13,67	15,14	15,45	15,76	15,99	16,32	16,73	17,16	
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM)	71,31	73,91	75,10	76,70	78,50	80,50	83	85,60	

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	13,7	15,1	15,5	15,8	16	16,3	16,7	17,2	
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM)	71,3	73,9	75,1	76,7	78,5	80,5	83	85,6	
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas	NA	51.409%	51.919%	52.429%	52.939%	53.449%	53.959%	54.469%	

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan)									
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat.	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, disusun dalam rangka untuk menjabarkan atas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2029. Selanjutnya RENSTRA yang telah disusun ini akan menjadi acuan dalam proses peyusunan tahunan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selanjutnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) setiap tahun akan dilakukan evaluasi.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, mengacu pada Visi Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, **"Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045"**, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian **Misi ke-1**: **Meningkatka layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global; Misi ke-3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas** ; **dan Misi ke-5: Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya local, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan.**, maka untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan indikator kinerja utama yaitu Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan; Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM); dan Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah), dengan Program Pengelolaan Arsip; Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip; Program Pembinaan Perpustakaan; Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno;

Adapun rencana tindak lanjut pengembangan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan melalui arah kebijakan Transportasi Digital Kearsipan dan Literasi.

Rencana Stretegis (RENSTRA) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah harus terus disempurnakan

dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu Renstra diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Reviu Renstra, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun dalam pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat terwujud dengan baik, dan hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir.

POHON KINERJA KEARSIPAN

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yg berintegritas & dinamis

Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Prov Jateng

Meningkatnya Pengelolaan Arsip Provinsi sesuai NSPK	Meningkatnya Pemanfaatan Arsip oleh Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan	**Terlaksanannya Akuisi Arsip Statis dari Pencipta arsip dan perorangan** **Terlaksananya pengolahan dan pelestarian arsip statis** **Terlaksanannya Layanan dan Pemanfaatan arsip serta Pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan Dan lembaga Kearsipan**	**Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip** **Terlaksananya penyusutan arsip yg habis masa retensinya** **Terlaksananya pengalihmediaan arsip**
Terlaksananya kepatuhan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dan NSPK kearsipan secara efektif **Terlaksananya tertib pengelolaan arsip secara terintegrasi** **Terlaksananya Peningkatan wawasan Sumber Daya Manusia (SDM) Arsiparis** **Terlaksananya pengembangan kerjasama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan**	**Terlaksananya penambahan khazanah arsip statis** **Tersedianya sarana temu kembali arsip dan penyimpanan arsip statis** **Terlaksananya pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan budaya bangsa serta peningkatan pameran dan sosialisasi kearsipan**	**terlaksanannya fasilitasi freservasi arsip terdampak bencana** **terlaksanannya fasilitasi penilaian dan pemusnahan arsip Inaktif yang habis masa retensinya dan dinyatakan musnah** **terlaksanannya penyelamatan arsip dari resiko kerusakan dan digitalisasi arsip**

POHON KINERJA PERPUSTAKAAN

Meningkatknya kualitas SDM Jawa Tengah

Meningkatnya pembangunan karakter

Meningkatnya literasi masyarakat

Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat				Terpenuhinya sarpras literasi	Terpenuhinya koleksi bacaan			Ketercukupan SDM Perpustakaan	
Terlaksananya pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi	Meningkatnya kerjasama bidang perpustakaan		Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan yg sesuai SNP	Meningkatnya sosialisasi kegemaran membaca kpd masyarakat	Terlaksananya Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustaakaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Terlaksananya Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara oleh perpust tk. Daerah provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Daerah provinsi	Terlaksananya penyusunan data dan informasi perpustakaan,tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk daerah provinsi

Tujuan	**Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah** **IK: Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah (LKD dan OPD)**						
DO	**Nilai LKD dan OPD (60:40)**						
Sasaran	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Prov Jateng** **Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan LKD Provinsi** **Persentase arsip bersejarah yg ditetapkan sbg MKB**						
Program	**Program pengelolaan arsip**			**Program perlindungan dan penyelamatan arsip**			
KINERJA/SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi, Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota (Bidang PPPK)	Meningkatkan Kelestarian Arsip Statis sebagai Memori Kolektif Bangsa (Bidang PPA)	Meningkatnya Kualitas Layanan Kearsipan Prov Jateng (Bidang LPA)	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Bidang PPA)			
Definisi Ops	Mengukur peningkatan kepatuhan penyelenggaraan kearsipan pada LKD (Prov/Kab/Kota) dan Perangkat Daerah Provinsi	Mengukur tingkat Pengelolaan Arsip Statis oleh LKD Provinsi Jawa Tengah	Mengukur kepuasan pengunjung/pemustaka atas penyelenggaraan layanan kearsipan provinsi Jawa Tengah	Mengukur peningkatan jumlah Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	Mengukur persentase arsip yang dipulihkan akibat bencana	Mengukur peningkatan jumlah arsip yang diselamatkan melalui alihmedia (scan, film, alih suara dll)	
Indikator	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase peningkatan OPD yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	Persentase pemulihan arsip akibat bencana	Persentase peningkatan arsip yg diselamatkan melalui alihmedia	
Formulasi	(Jumlah LKD (Prov/Kab/Kota) dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai hasil pengawasan kearsipannya "dibagi" Jumlah LKD (Prov/Kab/Kota) dan Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan kearsipan) "dikali" 100	(Jumlah arsip statis yang dikelola /Jumlah khazanah arsip statis yang dimiliki LKD) x 100	Pengukuran kepuasan pengunjung terhadap layanan kearsipan sesuai PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017	Persentase peningkatan OPD yg mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis : (Jumlah OPD yg melakukan pemusnahan th berjalan-jml Jumlah OPD yg melakukan pemusnahan th sblmnya) "dibagi" Jumlah OPD yg melakukan pemusnahan th sblmnya "dikali" 100	Persentase pemulihan arsip akibat bencana= jml arsip yg berhasil dipulihkan "dibagi" jml arsip yg terdampak bencana "dikali" 100	Persentase peningkatan arsip yg diselamatkan (Jumlah arsip yg dialihmediakan thn berjalan "dikurangi" Jumlah arsip yg dialihmediakan th sebelumnya) "dibagi" Jml arsip yg dialihmediakan th sbelumnya "dikali" 100	

Keterangan:
jml arsip statis yg dikelola adl arsip statis yg dikelola siap layan;
jml khazanah arsip statis adl keseluruhan arsip statis

Ket: satuan baseline data menggunakan "arsip"

						subid pelyanan	subid pemanfaatn		
Kegiatan	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**			**Kegiatan Pengelolaan arsip statis daerah provinsi**	**Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**		**Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki retensi dibawah 10 thn**	**Kegiatan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi**	**Kegiatan Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan provinsi**
Kinerja	Terlaksananya pengawasan kearsipan LKD Provinsi, Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan kearsipan pada OPD, BUMD, Ormas, Orpol	Terlaksananya pengembangan kapasitas arsiparis di Provinsi Jawa Tengah	Terkelolanya khazanah arsip statis provinsi	Terlaksananya layanan arsip statis LKD Provinsi Jawa Tengah	Meningkatnya partisipasi Unit Kearsipan PD dan LKD	Terlaksananya pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki retensi dibawah 10 thn	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi	Terlaksananya Kegiatan Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan provinsi (DO: Alih media)
Definisi Ops	Mengukur jml OPD Dan LKD Kab/Kota yg meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik	Mengukur jml OPD, BUMD, Ormas, Orpol yg mendapatkan pembinaan kearsipan	Mengukur kualitas dan kuantitas arsiparis di Provinsi Jawa Tengah	Mengukur jumlah arsip statis yang terkelola dan siap dilayankan, merupakan akumulasi dari proses akuisisi, pengolahan, dan pelestarian di tahun berjalan					
Indikator	Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik	Jumlah OPD BUMD, Ormas, Orpol yg mendapatkan pembinaan kearsipan	Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah arsip statis yang terkelola (satuan: arsip)	Jumlah Arsip yang terlayankan (arsip)	Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Jumlah Arsip yg dilakukan Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yg memiliki retensi dibawah 10 thn (satuan: arsip)	Jumlah Arsip yg dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	Jumlah Arsip yg dialih-mediakan (satuan: arsip)

TUJUAN: **Meningkatkan literasi masyarakat**
IK: **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

SASARAN: **Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat**
IK: **Nilai Tingkat Kegemaran Membaca**
NTGM mengukur tingkat kegemaran membaca masyarakat jawa Tengah

PROGRAM: Program Pembinaan Perpustakaan

KINERJA	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan yg sesuai SNP	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah
IK	Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai SNP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
DO	Mengukur persentase peningkatan perpus umum, khusus dan satpendik sesuai kewenangan Provinsi yg penyelenggaraannya sesuai SNP	Mengukur kepuasan pengunjung/pemustaka atas penyelenggaraan layanan perpustakaan umum provinsi Jawa Tengah
Formulasi		Pengukuran kepuasan pengunjung terhadap layanan perpustakaan sesuai PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017

KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan perpustakaan Tk Daerah Provinsi			
KINERJA	Terlaksananya penyelenggaraan perpustakaan sesuai SNP yang menjadi kewenangan Provinsi			
IK	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi		Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi	Jumlah Perpustakaan Sekolah sesuai kewenangan provinsi yg penyelenggaraannya sesuai SNP
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pembinaan perpustakaan pada sat pendidikan menengah dan pendidikn khusus di seluruh wil provinsi sesuai dengan standar nasional
KINERJA	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan umum dan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya penyusunan data dan informasi perpustakaan,tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk daerah provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Daerah provinsi	Terlaksananya pembinaan perpustakaan pd sat pendidikan menengah dan pendidikn khusus diseluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan
IK	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan,tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk daerah provinsi (satuan: dokumen T: 1 dok)	Jumlah tenaga perpustakaan yg ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Daerah provinsi	Jumlah perpustakaan sat pendidikan menengah dan pendidikn khusus yg dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional
	Seksi Pengembangan & Kerjasama (bu Heny)		**Sie Pembinaan**	

KEGIATAN	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tk. Daerah provinsi		
KINERJA	Meningkatkan pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat		
IK	Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus	Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada sat pendidikan menengah dan pendidikn khusus serta masyarakat	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Sub Kegiatan Pemilihan duta baca/bunda baca/Bunda literasi Tk Daerah Provinsi
KINERJA	Meningkatnya keterlibatan sat pendidikan menengah dan pendidikn khusus dlm sosialisasi budaya baca	Terlaksananya pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Terlaksananya pemilihan duta baca/bunda baca/bunda literasi tk. Daerah provinsi
IK	Jumlah lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan literasi pada sat pendidikan menengah dan pendidikn khusus	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah duta baca Tingkat daerah provinsi yg dipilih dan didukung kegiatannya
	Sie Pembudayaan Gemar Membaca		

KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan perpustakaan Tk Daerah Provinsi				Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
KINERJA	Meningkatkan ketercukupan koleksi Perpustakaan	Meningkatkan jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah		Meningkatkan pemanfaatan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Meningkatnya pembudyaan gemar membaca
IK	Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (DO: Jenis layanan utama perpusda Sriwijaya. BL: 6; T: 8, 10,12,14,16,18)		Peningkatan jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jateng	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan TPBIS yang diselenggarakan di Perpus Prov Jateng
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
KINERJA	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Terlaksananya Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustaakaan elektronik dgn manajemen layanan TIK berbasis iso20000	Terlaksananya Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi melalui peningkatan koleksi	Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Terlaksananya pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi
IK	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Jumlah perpustakaan elektronik yg dpelihara dgn manajemen layanan TIK berbasis iso20000	Jumlah layanan perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yg dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan
	Seksi Akuisisi	**Seksi Layanan**			

PROGRAM: Program Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno

KINERJA: Meningkatkan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
IK: Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (DO: Peningkatan koleksi daerah dan lokal konten (naskah kuno/terkait kebudayaan jateng)
DO: Mengukur peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

KEGIATAN	kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di provinsi		kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah		kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
KINERJA	Terlaksananya tertib serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Terlaksananya inventarisasi koleksi daerah dan bibliografi Daerah		Meningkatkan jumlah koleksi naskah kuno yang dilestarikan di Jawa Tengah	Meningkatkan jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah	
IK	Jumlah Penerbit Yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Prov Jateng (DO: BL 179 T: +5, +10, +20 penerbit)		Jumlah naskah KID dan BID yang diterbitkan (DO: Laporan KID BID; T: 2 Lap tiap tahun)		Jumlah koleksi naskah kuno di Jawa Tengah yang dialih-mediakan (DO: Jml penambhan naskah kuno yg dimiliki oleh perpusda jateng, BL: (2024) yg dialihmediakan)	jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah (DO: Jml penambahn koleksi etnis budaya yg telah diolah BL 200; T: 368,593,875)	
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Sub Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah	Sub Kegiatan Penerbitan Bibliografi Daerah	Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Sub Kegiatan Seleksi dan pengadaan koleksi etnis budaya nusantara	Sub Kegiatan Pengolahan dan penyiangan koleksi etnis budaya nusantara
KINERJA	Terlaksananya penghimpunan dan pengelolaan KCKR serta peningkatan kepatuhan serah simpan KCKR	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kpd penerbit dan produsen KCKR yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terlaksananya Penerbitan KID Prov	Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Terlaksananya Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara oleh perpust tk. Daerah provinsi	Terlaksananya Pengolahan dan penyiangan koleksi etnis budaya nusantara oleh perpust tk. Daerah provinsi
IK	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (DO: Jml KCKR yg diserahkan penerbit tiap tahun;BL: 3.000 (2024), T: 3.500;4.000;4.500;5.000;5.500)	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Dok KID dan Lit. Sekunder lainnya yg diterbitkan (sat: entry, BL: (2024) T:??)	Jumlah Bibliografi Daerah yg diterbitkan (1 naskah)	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
	Seksi Deposit					**Seksi Akuisisi**	

LAMPIRAN 3. Manajemen Risiko Perangkat Daerah

a. Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatkan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Tidak tercapainya target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Risiko Strategis	Kebijakan pusat dan daerah belum memprioritaskan pemenuhan UPLM	Tidak semua perpustakaan dalam tahun berjalan melakukan penambahan sarpras dan memenuhi syarat UPLM	Pemerintah Provinsi dan Daerah
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Gemar Membaca (NTGM)	Masyarakat tidak berminat membaca buku	Risiko Strategis	Kebijakan pemenuhan koleksi bahan perpustakaan telah ada namun belum menjadi prioritas	Tingkat kegemaran membaca masyarakat rendah	Pemerintah Daerah dan masyarakat
3	Sasaran Program	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan jumlah Perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	Pelaksanaan Re-Akreditasi belum berjalan sesuai masa berlakunya sertifikat akreditasi perpustakaan	Risiko Operasional	Berkurangnya prioritas anggaran terkait akreditasi	Belum semua perpustakaan mengikuti akreditasi	Perpustakaan kewenangan provinsi
4	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan perpustakaan Tk Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Pelaksanaan Re-Akreditasi belum berjalan sesuai masa berlakunya sertifikat akreditasi perpustakaan	Risiko Operasional	Perpustakaan Umum Kab/Kota masih memprioritaskan anggaran untuk pengembangan layanan perpustakaan	Belum semua perpustakaan mengikuti akreditasi	Perpustakaan kewenangan provinsi

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan perpustakaan Tk Daerah Provinsi	Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi	Minimnya SDM Perpustakaan yang tersertifikasi	Risiko Operasional	Keterbatasan kegiatan uji sertifikasi pustakawan	Tidak semua SDM Perpustakaan dapat mengikuti uji sertifikasi	Pustakawan dan masyarakat
6	Sasaran Program	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase partisipasi Satpendik Menengah dan Khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca (DO: Mengukur partisipasi Satpendik Menengah dan Khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca	Rendahnya minat baca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca	Risiko Operasional	Kurangnya pembiasaan membaca sejak dini serta Generasi muda yang condong dengan gadget/media sosial	Menurunnya minat baca dan kunjungan serta pemanfaatan fasilitas perpustakaan	Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus serta Masyarakat
7	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tk. Daerah provinsi	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Rendahnya partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	Risiko Operasional	Kurangnya minat baca dan literasi pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Menurunnya minat baca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Sasaran Program	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Turunnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Risiko operasional	Turunnya nilai kepuasan masyarakat	Kepuasan masyarakat menurun	institusi dan masyarakat
9	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan perpustakaan Tk Daerah Provinsi	Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum sesuai SNP	Risiko operasional	Penentuan target kinerja tidak berdasarkan judul	Peningkatan koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam jumlah eksemplar	institusi dan masyarakat
10	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan perpustakaan Tk Daerah Provinsi	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Jenis layanan perpustakaan tidak berkembang	Risiko operasional	Kurangnya fasilitas dan sarana pendukung	Kepuasan masyarakat menurun	Instansi dan masyarakat
11	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan perpustakaan Tk Daerah Provinsi	Peningkatan jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jateng	Pengunjung menurun	Risiko operasional	Kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan	Kepuasan masyarakat menurun	Instansi dan masyarakat
12	Sasaran Kegiatan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat yang terlibat menjadi peserta kegiatan TPBIS	Minimnya partisipasi masyarakat	Risiko operasional	Kurangnya minat masyarakat	Kepuasan masyarakat menurun	Instansi dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Sasaran Program	Program Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	Koleksi daerah dan lokal konten Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah terbatas	Risiko operasional	Penyerahan KCKR, Katalog Induk Daerah (KID), Bibliografi Daerah dan pengolahan konten lokal tidak optimal	Keberadaan koleksi daerah dan lokal konten di Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah tidak lengkap	Instansi, Penerbit dan Masyarakat
14	Sasaran Kegiatan	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah provinsi	Jumlah Penerbit Yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng	Penerimaan koleksi Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) di Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah terbatas	Risiko Kepatuhan	Penerbit/produsen KCKR kurang tertib menyerahkan koleksi Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) ke Perputakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Data informasi Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) belum optimal	Instansi dan Masyarakat
15	Sasaran Kegiatan	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah naskah KID dan BID yang diterbitkan	Naskah Katalog Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah terbatas	Risiko Kepatuhan	Penyerahan Naskah Katalog Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kurang optimal	Terbitan Naskah Katalig Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah tidak tersaji secara utuh	Instansi dan Masyarakat
16	Sasaran Kegiatan	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah koleksi naskah kuno di Jawa Tengah yang dialih-mediakan	Minimnya sumber informasi naskah kuno	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menginformasikan keberadaaan naskah kuno	Hasil alih media naskah kuno jumlahnya sedikit	Instansi dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sasaran Kegiatan	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah	Koleksi etnis budaya nusantara daerah Jawa Tengah sedikit	Risiko operasional	Pengolahan koleksi etnis budaya nusantara masih dari hibah masyarakat	Kebutuhan informasi Koleksi etnis budaya nusantara belum terpenuhi	institusi dan masyarakat
18	Sasaran Strategis	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah (LKD dan OPD)	Ketersediaan Arsip untuk dilayankan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat	Risiko Strategis	Pencipta arsip belum menyerahkan ke LKD	Arsip yang dilayankan belum sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat
19	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Prov Jateng	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan LKD Provinsi	Aspek pengelolaan arsip belum sesuai NSPK	Risiko Strategis	1. Belum semua Pedoman Kearsipan di level daerah sesuai dengan level di atasnya 2. Sarpras pengolahan belum memadai arsip dinamis inaktif dan statis	Pengolahan arsip tdk maksimal	Pemerintah Daerah
20	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Prov Jateng	Persentase arsip bersejarah yg ditetapkan sebagai MKB	Arsip bersejarah yang diajukan tidak teregister sebagai MKB	Risiko Strategis	Sebagian data pelengkap bukan merupakan kewenangan/hak milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Arsip bersejarah tidak teregister sebagai MKB sehingga pemanfaatannya terbatas	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Sasaran Program	Program pengelolaan arsip	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	Pelaksanaan pengawasan kearsipan belum sesuai dengan ketentuan	Risiko Operasional	Pelaksanaan verifikasi bukti dukung terhadap Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukan secara langsung	Penetapan dan penyampaian nilai hasip pengawasan kearsipan tidak tepat waktu	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
22	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik	Jumlah arsip statis pada LKD Provinsi/Kabupatten/ Kota masih sangat terbatas	Risiko Operasional	Perangkat Daerah yang menyerahkan arsip bernilai statis masih kurang	Pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah belum sampai pada tahap penyusutan (usul serah dan usul Musnah)	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
23	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah OPD BUMD, Ormas, Orpol yang mendapatkan pembinaan kearsipan	Tidak terlaksananya seluruh isi klausul dalam Perjanjian Teknis Kerjasama	Risiko Kemitraan	Permasalahan kearsipan belum dianggap penting oleh mitra	Pengelolaan arsip pada Lembaga mitra belum memenuhi NSPK	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
24	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Jawa Tengah	Kwantitas belum sebanding dengan kwalitas arsiparis	Risiko Operasional	Belum semua SDM kearsipan tersertifikasi	Jumlah SDM Kearsipan mayoritas belum tersertifikasi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Sasaran Program	Program pengelolaan arsip	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	Arsip kurang sesuai NSPK	Risiko Operasional	Khazanah arsip kurang, kesehatan SDM kurang terjamin, wawasan narasumber sejarah lisan menurun	Arsip kurang sesuai NSPK	PD, LKD, Masyarakat
26	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan arsip statis daerah provinsi	Jumlah arsip statis yang terkelola	Tidak terkelolanya arsip statis khazanah Dinarpus	Risiko Operasional	Perlindungan terhadap SDM pengelola arsip dari ancaman penyakit masih kurang	Arsip yang terkelola menjadi kurang secara kualitas dan kuantitas	PD, LKD, Masyarakat
27	Sasaran Program	Program pengelolaan arsip	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Turunnya nilai Survey kepuasan Masyarakat	Risiko operasional	- kurangnya sarana dan prasarana Layanan Arsip - Sistem layanan Arsip statis	kepuasan Penguna/Pengunjung menurun	Masyarakat (Peneliti, Mahasiswa, Lembaga/Organisasi)
28	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Provinsi	Jumlah Arsip yang terlayankan (arsip)	Minimnya khasanah arsip statis yang diakses masyarakat	Risiko operasional	- Keterbatasan khasanah arsip statis yang disajikan - Minimnya pemenuhan anggaran	Jumlah peminjaman arsip menurun	Masyarakat (Peneliti, Mahasiswa, Lembaga/Organisasi)
29	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Rendahnya jumlah unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Risiko Operasional	Kurang menariknya kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Jumlah parsipasi unit kearsipan dan LKD Provinsi Rendah dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Unit Kearsipan dan LKD Provinsi

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Sasaran Program	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase peningkatan OPD yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	Kurang optimalnya PD dalam melaksanakan pemusnahan arsip	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman peraturan yang mendukung pemusanahan arsip	Banyaknya arsip yang tidak bernilai guna di OPD	OPD
31	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki retensi dibawah 10 thn	Jumlah Arsip yg dilakukan Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yg memiliki retensi dibawah 10 thn	Efisiensi ruang penyimpanan arsip (record centre) tidak tercapai	Risiko Operasional	Ruang penyimpanan arsip dipenuhi arsip-arsip yang tidak memiliki nilai guna	Ruang penyimpanan tidak mampu menampung arsip	LKD dan OPD
32	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi	Jumlah Arsip yg dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	Hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip akibat bencana	Risiko Operasional	Fisik arsip semakin rusak akibat bencana	Hilangnya arsip sebagi rekaman informasi perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat dan organisasi	OPD, LKD, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan provinsi	Jumlah Arsip yg dialih-mediakan (satuan: arsip)	Hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip akibat tidak ada cadangan/back up arsip sesuai penjaminan keabsahan arsip	Risiko Operasional	Informasi yang terkandung dalam arsip sesuai penjaminan keabsahan arsip perlu diselamatkan	Hilangnya informasi arsip yang sesuai penjaminan keabsahan arsip	PD, LKD, Masyarakat
34	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip yg dinyatakan hilang	Tidak terselamatkannya arsip yang dinyatakan hilang	Risiko kepatuhan	Arsip belum diketahui keberadaannya	Tidak terselamatkannya informasi dan fisik arsip yang terkandung pada arsip yang dinyatakan hilang	LKD dan Masyarakat
35	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Kurangnya efektivitas manajemen risiko di instansi	Risiko Strategis	Perubahan kebijakan atau regulasi terkait pengelolaan risiko secara mendadak	ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan proses manajemen risiko yang berjalan	OPD
36	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Risiko Strategis	Penetapan Standar Pelayanan belum memenuhi kriteria	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurun	OPD dan masyarakat
37	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Indikator kinerja OPD tidak tercapai sepenuhnya	Risiko Operasional	Perencanaan dan monitoring kurang optimal	Capaian kinerja dibawah 100%	OPD

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Sasaran Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja kurang optimal	Risiko Operasional	Keterbatasan waktu penyusunan dokumen, kesulitan pengumpulan data dukung	Pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran kurang efektif dan efisien	OPD
39	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kurang optimalnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Minimnya jumlah barang persediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan, umum, kepegawaian dan keuangan	Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan tidak optimal	OPD, ASN
40	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Perhitungan gaji ASN dan honorarium pengelola keuangan perangkat daerah tidak valid	Risiko Operasional	Kurang tepatnya perhitungan gaji ASN dan honorarium pengelola keuangan perangkat daerah	Administrasi keuangan tidak sesuai dengan dokumen anggaran	OPD, ASN
41	Sasaran Kegiatan	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Data Asset Perangkat Tidak valid dan tidak terjaminnya keamanan asset Perangkat Daerah	Risiko Operasional	Tidak tertib administrasi dalam pengelolaan asset	Data Asset Perangkat Tidak sesuai dengan administrasi dan asset tidak mendapatkan jaminan keamanan	OPD, Asset BMD

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Sasaran Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Banyaknya kasus kesalahan administrasi di bidang administrasi kepegawaian	Risiko Operasional	- Minimnya Wawasan ASN terhadap regulasi kepegawaian; - Tidak tertibnya pengelolaan administrasi kepegawaian secara mandiri sesuai regulasi	- Penuurunan kinerja perangkat daerah, terjadinya konflik ASN, dokumen hilang, peningkatan SDM ASN kurang diperhatikan	OPD, ASN
43	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan administrasi umum PD tidak memenuhi standar layanan	Risiko Operasional	- Kurangnya sarpras dan kebutuhan peralatan kantor, - adanya penyimpangan spesifikasi barang yang dibutuhkan dalam proses pengadaan	Sarpras dan fasilitas layanan tidak memenuhi standar pelayanan	OPD, ASN
44	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Spesifikasi barang yang diadakan tidak sesuai dengan pagu anggaran belanja	Risiko Fraud/Kecurangan	Dalam proses pengadaan terjadi kecurangan	Barang yang diterima tidak memenuhi kebutuhan karena berbeda spesifikasi	OPD

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kurang optimalnya layanan administrasi dan layanan publik	Risiko Operasional	Kurangnya kualitas SDM administrasi dan kuantitas SDM tenaga IT	Layanan informasi publik tidak optimal	OPD, masyarakat
46	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Risiko Fraud/Kecurangan	- Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan, - Keterlibatan pihak ketiga dalam pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	- Hasil pemeliharaan kurang sesuai standar; - Kebutuhan anggaran melebihi kewajaran	OPD, masyarakat

b. Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak tercapainya target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	4	3	12	Ada	Memfasilitasi dan mendampingi pengukuran IPLM	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masyarakat tidak berminat membaca buku	5	5	25	Ada	Memfasilitasi dan mendampingi pengukuran TGM	Belum Memadai	4	4	16
Pelaksanaan Re-Akreditasi belum berjalan sesuai masa berlakunya sertifikat akreditasi perpustakaan	4	4	16	Ada	Memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan re-akreditasi perpusakaan kewenangan provinsi	Belum Memadai	4	3	12
Pelaksanaan Re-Akreditasi belum berjalan sesuai masa berlakunya sertifikat akreditasi perpustakaan	4	3	12	Ada	Memfasilitasi pelaksanaan re-akreditasi pada perpustakaan kewenangan provinsi	Belum Memadai	3	2	6
Masih ada SDM Perpustakaan yang belum mengikuti Uji Sertifikasi	4	4	16	Ada	Sosialisasi tentang Manfaat Uji Sertifikasi	Belum Memadai	4	3	12
Rendahnya minat baca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca	4	3	12	Ada	Mengadakan kegiatan untuk menggalakkan pembudayaan gemar membaca Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendahnya partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	4	4	16	Ada	Mengadakan Kegiatan Lomba Bidang Perpustakaan; Bimtek Literasi Informasi untuk Pustakawan, Guru dan Pegiat Literasi; Lomba Video Konten Literasi; Pemberian Penghargaan Gerakan Gemar Membaca; dan Pemilihan Duta Baca Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Memadai	4	3	12
Turunnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4	3	12	Ada	Penambahan Inovasi layanan perpustakaan	Belum Memadai	3	3	9
Peningkatan koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum sesuai SNP	4	4	16	Ada	Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mengusulkan target kinerja peningkatan koleksi keberagaman perpustakaan berdasarkan eksemplar	Belum Memadai	4	3	12
Jenis layanan perpustakaan tidak berkembang	4	3	12	Ada	Membuat Inovasi layanan	Belum memadai	3	3	9
Pengunjung menurun	4	3	12	Ada	Promosi melalui medsos dll, fieldtrip dan demonstrasi ijtaeng	Belum memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minimnya partisipasi masyarakat	4	3	12	Ada	Promosi melalui medsos dll, fieldtrip dan demonstrasi ijtaeng	Belum memadai	3	3	9
Koleksi daerah dan lokal konten Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah terbatas	4	3	12	Ada	1. Mengolah KID dan Bibliografi Daerah yang sudah diterima di perpustakaan 2. Melaksanakan alih media koleksi naskah kuno yang terdapat di perpustakaan 3. Melaksanakan pengolahan koleksi budaya etnis nusantara	Belum memadai	3	3	9
Penerimaan koleksi Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) di Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah terbatas	4	3	12	Ada	Menghimpun terbitan KCKR dari penerbit dan melaksanakan hunting/pemantauan ke penerbit	Belum memadai	3	3	9
Naskah Katalog Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah terbatas	4	3	12	Ada	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah se-Jawa Tengah	Belum memadai	3	3	9
Minimnya sumber informasi naskah kuno	4	3	12	Ada	Melaksanakan hunting naskah kuno di masyarakat	Belum memadai	3	3	9
Koleksi etnis budaya nusantara daerah Jawa Tengah sedikit	4	4	16	Ada	Melaksanakan kegiatan pengolahan koleksi budaya etnis nusantara	Belum Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketersediaan Arsip untuk dilayankan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat	5	5	25	ada	Nota Dinas Kepala Dinas Kepala Dinarpus kepada Sekda tentang hasil Pengawasan Kearsipan (GNSTA)	Belum memadai	4	4	16
Aspek pengelolaan arsip belum sesuai NSPK	5	5	25	Ada	Pemeliharaan/ Pengadaan	Belum memadai	4	4	16
Arsip bersejarah yang diajukan tidak teregister sebagai MKB	5	5	25	Ada	- Koordinasi dengan bidang Pengolahan dan pelestarian Arsip - Melakukan penelusuran arsip sesuai tema yang diajukan Memori Kolektif Bangsa.	Belum memadai	4	4	16
Pelaksanaan pengawasan kearsipan belum sesuai dengan ketentuan	4	4	16	Ada	Peningkatan kwalitas SDM pengawasan kearsipan	Belum memadai	3	3	9
Jumlah arsip statis pada LKD Prov/Kab/Kota masih terbatas	4	4	16	Ada	Pendampingan terhadap Perangkat Daerah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan	Belum memadai	4	3	12
Tidak terlaksananya seluruh isi klausul dalam Perjanjian Teknis Kerjasama	4	4	16	Ada	Pendampingan dan peningkatan kwalitas SDM kearsipan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan	Belum memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kwalitas SDM kearsipan tidak sebanding dengan pencipta arsip	4	4	16	Belum Ada	-	Belum memadai	4	4	16
Arsip kurang sesuai NSPK	3	3	9	Ada	Sosialisasi, APD dan penggunaan sarpras yang memadai	Belum memadai	3	3	9
Tidak terkelolanya arsip statis khazanah Dinarpus	3	3	9	Ada	Sosialisasi, APD dan penggunaan sarpras yang memadai	Belum memadai	3	3	9
Turunnya nilai Survey kepuasan Masyarakat	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan Sekretariat berkaitan dengan sarana dan Prasarana Layanan Arsip	Belum memadai	2	3	6
Minimnya khasanah arsip statis yang diakses masyarakat	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip untuk menambah khasanah arsip statis	Belum Memadai	2	3	6
Rendahnya jumlah unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	3	4	12	Ada	Membuat kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip secara menarik (inovasi kegiatan)	Belum Memadai	3	3	9
Kurang optimalnya PD dalam melaksanakan pemusnahan arsip	3	3	9	Ada	Pendampingan pemusnahan arsip PD	Memadai	3	3	9
Efisiensi ruang penyimpanan arsip (record centre) tidak tercapai	3	3	9	Ada	Pemusnahan arsip secara rutin	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip akibat bencana	3	3	9	Ada	Mitigasi resiko kerusakan arsip akibat bencana	Belum	3	3	9
Hilangnya informasi yang terkandung dalam arsip akibat tidak ada cadangan/back up arsip sesuai penjaminan keabsahan arsip	3	3	9	Ada	Alih media arsip sesuai penjaminan keabsahan arsip	Belum	3	3	9
Tidak terselamatkannya arsip yang dinyatakan hilang	3	4	12	Belum	-		3	4	12
Kurangnya efektivitas manajemen risiko di instansi	4	4	16	Ada	Pengelolaan risiko melalui proses manajemen risiko (identifikasi, monitoring dan pengendalian risiko)	Belum Memadai	3	4	12
Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	5	5	25	Ada	Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, Standar Pelayanan Prima, penyediaan layanan yang beragam	Belum Memadai	4	4	16
Indikator kinerja OPD tidak tercapai sepenuhnya	3	3	9	Ada	Persiapan lebih awal, manajemen waktu, komunikasi lebih intens, evaluasi berkala	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja kurang optimal	3	3	9	Ada	Mempersiapkan lebih awal, membuat pola waktu penyusunan, berkomunikasi lebih intens dengan pengampu terkait informasi terbaru, koordinasi dengan kontributor data	Memadai	2	2	4
Kurang optimalnya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	4	4	16	Ada	Berkoordinasi dengan Sub Bagian Program terkait penganggaran, sosialisasi ke ASN	Memadai	2	2	4
Perhitungan gaji ASN dan honorarium pengelola keuangan perangkat daerah tidak valid	4	4	16	Ada	Berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum dan kepegawaian terkait data ASN dan BPKAD terkait penganggaran gaji.	Memadai	2	2	4
Data Asset Perangkat Tidak valid dan tidak terjaminnya keamanan asset Perangkat Daerah	3	3	9	Ada	Tertib administrasi pengelolaan asset dan selalu koordinasi dengan BPKAD dan Sub Bagian Umpeg	Memadai	2	2	4
Banyaknya kasus kesalahan administrasi di bidang administrasi kepegawaian	3	3	9	Ada	Berkordinasi dengan BKD, Biro Organisasi dan ASN	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Layanan administrasi umum PD tidak memenuhi standar layanan	3	3	9	Ada	- monitoring proses pengadaan barang, menganggarkan untuk perbaikan sarpras dan peralatan kantor, - Optimaliasasi sarpras yang ada	Memadai	2	2	4
Spesifikasi barang yang diadakan tidak sesuai dengan pagu anggaran belanja	3	5	15	Ada	Monitoring pengadaan barang dan jasa	Memadai	1	5	5
Kurang optimalnya layanan administrasi dan layanan publik	4	4	16	Ada	Optimalisasi sarana layanan publik yang tersedia	Memadai	2	2	4
Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3	5	15	Ada	- Seleksi penyedia sesuai kompetensi - Monitoring proses pemeliharaan secara lebih intens	Memadai	1	5	5

c. Penetapan Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Masyarakat tidak berminat membaca buku	16	Kepala Dinas Arpus	Kebijakan pemenuhan koleksi bahan perpustakaan telah ada namun belum menjadi prioritas	Tingkat kegemaran membaca masyarakat rendah
Pelaksanaan Re-Akreditasi belum berjalan sesuai masa berlakunya sertifikat akreditasi perpustakaan	12	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Berkurangnya prioritas anggaran terkait akreditasi	Belum semua perpustakaan mengikuti akreditasi
Masih ada SDM Perpustakaan yang belum mengikuti Uji Sertifikasi	12	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Keterbatasan kegiatan uji sertifikasi pustakawan	Tidak semua SDM Perpustakaan dapat mengikuti uji sertifikasi
Rendahnya minat baca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca	12	Bidang Pengembangan Perpustakaan	Membaca dianggap sebagai suatu kegiatan yang membuat bosan dan kurang menarik	Menurunnya minat baca, minat berkunjung dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat
Rendahnya partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	12	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Kurangnya minat baca dan literasi pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Menurunnya minat baca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat
Peningkatan koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum sesuai SNP	12	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Penentuan target kinerja tidak berdasarkan judul	Peningkatan koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam jumlah eksemplar
Koleksi etnis budaya nusantara daerah Jawa Tengah sedikit	12	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Pengolahan koleksi etnis budaya nusantara masih dari hibah masyarakat	Kebutuhan informasi Koleksi etnis budaya nusantara belum terpenuhi

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Ketersediaan Arsip untuk dilayankan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat	16	Kepala Dinas	Pencipta arsip belum menyerahkan ke LKD	Arsip yang dilayankan belum sesuai kebutuhan masyarakat
Aspek pengelolaan arsip belum sesuai NSPK	16	Kepala Dinas	- Belum semua Pedoman Kearsipan di level daerah sesuai dengan level di atasnya - Sarpras pengolahan belum memadai arsip dinamis inaktif dan statis	Pengolahan arsip tidak maksimal
Arsip bersejarah yang diajukan tidak teregister sebagai MKB	16	Kepala Dinas	Sebagian data pelengkap bukan merupakan kewenangan/hak milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Arsip bersejarah tidak teregister sebagai MKB sehingga pemanfaatannya terbatas
Jumlah arsip statis pada LKD Prov/Kab/Kota masih terbatas	12	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Perangkat Daerah yang menyerahkan arsip bernilai statis masih kurang	Pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah belum sampai pada tahap penyusutan (usul serah dan usul Musnah)
Kwalitas SDM kearsipan tidak sebanding dengan pencipta arsip	16	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Belum semua SDM kearsipan tersertifikasi	Jumlah SDM Kearsipan mayoritas belum tersertifikasi
Tidak terselamatkannya arsip yang dinyatakan hilang	12	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Arsip belum diketahui keberadaannya	Tidak terselamatkannya informasi dan fisik arsip yang terkandung pada arsip yang dinyatakan hilang
Kurangnya efektivitas manajemen risiko di instansi	12	Sekretaris	Perubahan kebijakan atau regulasi terkait pengelolaan risiko secara mendadak	ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan proses manajemen risiko yang berjalan
Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	16	Sekretaris	Penetapan Standar Pelayanan belum memenuhi kriteria	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurun

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	16	Penetapan Standar Pelayanan belum memenuhi kriteria	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurun	Melaksanakan monev pelaksanaan Standar Pelayanan dan pengembangan jenis layanan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat	Kepala Dinas	Setiap Tahun
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Kurangnya efektivitas manajemen risiko di instansi	12	Perubahan kebijakan atau regulasi terkait pengelolaan risiko secara mendadak	Ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan proses manajemen risiko yang berjalan	Mengidentifikasi risiko, mengendalikan dan memantau efektivitas pengendalian risiko	Kepala Dinas	Setiap Tahun
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan LKD Provinsi	Aspek pengelolaan arsip belum sesuai NSPK	16	1. Belum semua Pedoman Kearsipan di level daerah sesuai dengan level di atasnya 2. Sarpras pengolahan arsip dinamis inaktif dan statis belum memadai	Pengolahan arsip tidak maksimal	1. Merevisi Pedoman Kerasipan Daerah 2. Pemenuhan sarpras kearsipan sesuai NSPK	Kepala Dinas	Setiap tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Persentase arsip bersejarah yg ditetapkan sebagai MKB	Arsip bersejarah yang diajukan tidak teregister sebagai MKB	16	Sebagian data pelengkap bukan merupakan kewenangan/hak	Arsip bersejarah tidak teregister sebagai MKB sehingga pemanfaatannya terbatas	1. Koordinasi dengan pemilik sumber informasi, baik masyarakat maupun instansi/lembaga pemerintah yang lain 2. Melakukan penelusuran arsip sesuai tema yang diajukan Memori Kolektif Bangsa	Kepala Dinas	Setiap Tahun
Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Masyarakat tidak berminat membaca buku	16	Kebijakan pemenuhan koleksi bahan perpustakaan telah ada namun belum menjadi prioritas	Tingkat kegemaran membaca masyarakat rendah	Melakukan penambahan koleksi bahan pustaka yang uo to date dan sesuai kebutuhan masyarakat serta memfasilitasi untuk peningkatan budaya gemar membaca	Kepala Dinas	Setiap Tahun

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Jawa Tengah merupakan salah satu dari 6 (enam) provinsi yang ada di Pulau Jawa dan terletak di bagian tengah dengan Semarang sebagai ibukotanya. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) pada bagian selatan, Jawa Timur pada bagian timur laut serta Laut Jawa pada bagian utara. Secara geografis, provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, seperti Kabupaten Kendal, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan lain sebagainya. Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 17 diantaranya merupakan kabupaten/kota pesisir dengan 340 desa (BPS, 2024). Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki Perairan Umum Daratan berupa Sungai dengan jumlah 50 buah dan panjang 1.500 kilometer serta kawasan danau, waduk buatan, rawa atau lahan basah lainnya seluas 11.200 Ha (Balai Pusdatin SDA, 2017)

Secara geografis wilayah pesisir dan laut Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah pantai utara (Pantura) termasuk Kepulauan Karimunjawa dan wilayah pantai selatan (Pansela). Garis pantai Provinsi Jawa Tengah yang digunakan adalah garis pantai berdasarkan Peraturan Kepala BIG Nomor 26.4 Tahun 2021 dan Laporan Pemeriksaan Hasil Supervisi Peta Dasar Unsur Garis Pantai Untuk RTRW Jawa Tengah oleh Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Badan Informasi Geospasial pada tanggah 12 Oktober 2022 dengan panjang 1.127,85 km, yang mencakup garis pantai Wilayah Pantura 651,47 km, wilayah Kepulauan Karimunjawa 132,88 km dan wilayah Pansela adalah 343,50 km. Untuk wilayah perairan Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Demak perencanaan ruang laut menggunakan garis pantai rencana sebagaimana termuat dalam peta rencana pola ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi. Luas wilayah laut Jawa Tengah hingga 12 mil laut ke arah laut adalah 1.732.269,32 Ha dengan luas laut wilayah Pantura 916.426,40 Ha, luas wilayah laut Karimunjawa adalah 468.576,94 Ha dan luas wilayah Pansela adalah 347.265,98 Ha (Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir (RZWP3K) Tahun 2022).

Potensi kelautan dan perikanan Jawa Tengah meliputi luas mangrove existing sebesar 15.089 Hektar dengan potensi sebesar 44.784 Hektar (Peta Mangrove Nasional, 2021). Potensi perikanan tangkap pada Laut Jawa (WPP 712) yang mencakup 8 provinsi adalah 1.034.485 ton/tahun, sedangkan Samudra Hindia (WPP 573) yang mencakup 8 Provinsi adalah 1.338.442 ton/tahun dengan jumlah kapal Jawa Tengah tahun 2023 adalah 65.512 unit, jumlah nelayan 279.824 orang, Produksi perikanan tangkap tahun 2023 396.076 ton, Produksi perikanan budidaya di tahun 2023 sebesar 543.934 ton (KKP,2024). Potensi

tambak garam di Jawa Tengah tersebar di 5 (lima) Kabupaten wilayah pantai utara Jawa Tengah yaitu Jepara, Pati, Rembang, Demak dan Brebes, usaha pengembangan garam dilaksanakan di wilayah pantai selatan antara lain Kebumen, Cilacap dan Purworejo dengan dengan produksi tahun 2024 sejumlah 543.934 ton (KKP, 2024). Sedangkan jumlah unit usaha pengolahan produk kelautan dan perikanan (UPI dan UPPN) yang terdaftar 10.379 unit, jumlah unit usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan yang terdaftar 16.925 unit (KKP, 2024).

Pengelolaan potensi dan pemanfaatan peluang tersebut memerlukan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang matang, melalui implementasi ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan dan ketahanan pangan nasional. Ekonomi biru mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya kegiatan seperti perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, energi terbarukan, dan industri yang terkait dengan kelautan.

Namun demikian, peran ekonomi biru dalam memperkuat ketahanan ekonomi tidak terlepas dari tantangan dan risiko yang perlu diatasi, maka dari itu diperlukan perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional sebagai upaya antisipasi terhadap hambatan serta tantangan dalam pengelolaan. Secara teknis, perencanaan pengelolaan yang baik harus mampu mengantisipasi karakter sumberdaya perikanan laut yang pada hakekatnya tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi dan bersifat terbuka dalam pemanfaatannya. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ke depan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah diarahkan mengukuhkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, mengatasi penurunan produksi perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya, peningkatan daya dukung pesisir, peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat, peningkatan angka konsumsi ikan, serta optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam implemntasi ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi, memberikan sumber daya pangan dan protein yang vital bagi populasi, serta menawarkan peluang ekonomi yang berkelanjutan untuk masyarakat pesisir dan pulau-pulau di seluruh dunia. Untuk itu diperlukan suatu model perencanaan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan nasional dan regional dalam bentuk Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2025-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), dan menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk periode tahun 2025-2030,

maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mulai menyusun dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 2029 untuk menjabarkan visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, seluruh perangkat daerah juga secara paralel menyusun dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka menengah yang disusun berpedoman pada RPJMD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mencakup penyusunan pohon kinerja, cascading, manajemen resiko, analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja, serta perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hal lain yang termaktub dalam Rencana Strategis ini adalah perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (Lima) tahun, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Renstra digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional (RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, dinamika perubahan peraturan perundang-undangan (PP 12 Tahun 2019, Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021), angka kemiskinan, serta mendasarkan hasil evaluasi kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201950 halaman 86 sampai dengan 92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90).
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang -Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang;
16. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang mengatur Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 46);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025 – 2029;
33. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.2/0002764 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan dengan kebijakan nasional, dinamika perubahan peraturan perundangan-undangan, penyesuaian kebijakan pembangunan daerah serta dinamika pembangunan baru lainnya di Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah :

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan kelautan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung tujuan Jawa Tengah;
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan kelautan dan perikanan kurun waktu tahun 2025-2025 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0001565 tanggal 26 Februari 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Adapun sistematika Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026, dan mengulas hambatan hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Derah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD, dan/atau

indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Derah

Subbab ini berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah.

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis merupakan permasalahan Perangkat Daerah, potensi atau tantangan yang akan dihadapi oleh perangkat daerah ke depan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan Lingkungan Dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang mempengaruhi perangkat daerah langsung maupun tidak langsung

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran didapatkan dari kertas kerja Cascading Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya.

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD.

Perumusan tujuan dapat dilakukan dengan membalikkan penyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan merupakan kalimat aktif, dimulai dengan kata kerja yang menjelaskan arah keinginan/preferensi dan satu kata benda yang menjelaskan obyek yang menjadi menjadi fokus perhatian. Contoh:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
2. Menurunkan tingkat kemiskinan.

Dalam menentukan tujuan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur dan target selama lima tahun kedepan. Pernyataan tujuan dijabarkan dalam 1 (satu) atau lebih sasaran Perangkat Daerah.

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap Perangkat Daerah. Pernyataan sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas,

dan disusun dengan diawali dengan kata seperti meningkatnya atau menurunnya.

Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan perangkat daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Subbab ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan diuraikan dan dijelaskan secara naratif.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU

perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
    1. Perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
    2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
    3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
    4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
    5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh struktur/susunan organisasi adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, sebagaimana tersebut di atas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

(1) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
(2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
(3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
(4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
(5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
(6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
(7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
(8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

1. Subbagian Program.
   Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program, menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Program, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program, menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di Bidang Program, menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Program; dan, melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbagian Keuangan.
   Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Keuangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan, menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keuangan, menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan, menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan, melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
   Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian, menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Umum dan Kepegawaian, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian, menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian, menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan, melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, kepelabuhanan dan kenelayanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap;
2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan; dan
3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Kelompok Kerja : Kelompok Kerja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap dan Kelompok Kerja Kepelabuhanan dan Kenelayanan.

D. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan terkait peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Monitoring dan evaluasi terkait peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Pelaporan dan rekomendasi peningkatan produksi garam, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, usulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Kelompok Kerja : Kelompok Kerja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

E. Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan daratan, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan;
4. Monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan, penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan;
5. Pelaporan dan rekomendasi terkait pengendalian pemanfaatan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pembudidayaan ikan air payau dan perairan umum daratan, pergaraman, pengolahan, distribusi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan,

penumbuhkembangan masyarakat pengawas, pengembangan sistem pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan, kerjasama penegakan hukum, tindak lanjut hasil pengawasan penanganan pelanggaran dan pengenaan sanksi di bidang perikanan; dan

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional yaitu Kelompok Kerja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.

F. Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas perikanan budidaya kelautan dan perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan
2. Pelaksanaan kebijakan terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan;
4. Monitoring dan evaluasi terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan;
5. Pelaporan dan rekomendasi terkait penguatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dan pengembangan komoditas budidaya kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Kelompok Kerja : Kelompok Kerja Pengembangan Komoditas dan Kelompok Kerja Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

G. Cabang Dinas Kelautan Kelas A

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,

Cabang Dinas Kelautan Kelas A membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu dinas di bidang kelautan di wilayah kerjanya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Cabang Dinas Kelautan Kelas A melaksanakan fungsi:

1. penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengawasan kelautan, konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sub urusan pengawasan kelautan, konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
3. evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sub urusan pengawasan kelautan, konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir;
4. pengelolaan ketatausahaan administrasi perkantoran dan kepegawaian Cabang Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Kelautan Kelas A terdiri atas :

a. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A;
b. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A; dan
c. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A.

Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan Kelas A sebagai berikut:

a. Kepala Cabang Dinas

   Bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas sebagaimana tersebut di atas.

   Kepala Cabang Dinas melaksanakan kewenangan dalam hal :

   1. kewenangan pengawasan, meliputi :
      a. Operasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan
      b. Penetapan tindak lanjut penanganan pelanggaran.
   2. kewenangan konservasi, rehabilitasi dan perijinan, meliputi:
      a. Pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan konservasi dan rehabilitas;
      b. Pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis;
      c. Pemberian rekomendasi teknis.
   3. kewenangan lainnya, meliputi:
      a. Pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan pengawasan, konservasi, dan rehabilitasi;
      b. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.

b. Sub bagian Tata Usaha.

   Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan; melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan kegiatan; melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; menyiapkan pengelolaan administrasi keuangan; melaksanakan pengelolaan

adminstrasi perlengkapan dan peralatan kantor; melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat; melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga; melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat; melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Cabang.

c. Seksi Pengawasan;
   Bertugas menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional sebagian tugas dinas di bidang pengawasan kelautan; menyiapkan strategi, sarana prasarana, jadwal, wilayah jangkauan dan perawatan kapal pengawas; menyiapkan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pemanfaatan ruang laut; melaksanakan pengawasan di kawasan konservasi kewenangan provinsi; melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan; menyiapkan personel pengawas perikanan penerbitan HPK dan SLO kapal perikanan kewenangan provinsi di pelabuhan perikanan kewenangan provinsi; menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi serta pelaporan pengawasan SDK; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi
   Bertugas menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis sub urusan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana sub urusan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
   Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

H. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2025 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. **Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A**
   yang terdiri atas:
   a. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari; dan
   b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung;
2. **Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A**
   a. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor;
   b. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
   c. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo; dan
   d. Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending.
3. **Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B**
   yang terdiri atas:
   a. Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong;
   b. Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto;
   c. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang;
   d. Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan
   e. Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan.
4. **Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A**
5. **Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A**

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, menyinergikan dan mengendalikan operasional pengelolaan pelabuhan perikanan Nusantara dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pelabuhan Perikanan Nusantara kelas A dan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A melaksanakan fungsi :

a. Pelayanan tambat labuh bongkar muat dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
b. Pelaksanakan pemantauan usaha di bidang perikanan tangkap;
c. Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil tangkapan ikan;
d. Pelaksanaan koordinasi urusan Keamanan, Kebersihan, Ketertiban Keindahan, Dan Keselamatan (K5) dalam kawasan pelabuhan perikanan;
e. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan meliputi : mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Laut Lepas, memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk Kapal Perikanan berukuran paling kecil 30 (tiga puluh) *gross tonnage,* memiliki dan/ atau memanfaatkan dermaga paling pendek 150 (seratus lima puluh) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 3 (tiga) meter, mampu menampung Kapal Perikanan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) *gross tonnage,* memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 10 (sepuluh) hektar, terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan

pemasaran hasil perikanan rata-rata 15 (lima belas) ton per hari; dan terdapat industri pengolahan Ikan dan industri penunjang lainnya;

f. Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan;
g. Pelayanan dokumen distribusi ikan;
h. Pelayanan logistik dan perbekalan;
i. Pelayanan retribusi penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
j. Fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat;
k. Penyelenggaraan wisata Bahari;
l. Pengelolaan ketatausahaan; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Pelabuhan.
   Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A
b. Subbagian Tata Usaha.
   Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan; menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan; menyiapkan pengelolaan keuangan; menyiapkan pengelolaan kepegawaian; menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ; menyiapkan kerja sama dan kehumasan; menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
   Melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas : Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.
d. Unit Penunjang
   Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Sentra Pendaratan Ikan dan Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, menyinergikan dan mengendalikan operasional pengelolaan pelabuhan perikanan pantai dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pelabuhan Perikanan Pantai kelas A melaksanakan fungsi :

a. Pelayanan tambat labuh bongkar muat dan kesyahbandaran Pelabuhan perikanan;
b. Pelaksanakan pemantauan usaha di bidang perikanan tangkap;
c. Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil tangkapan ikan;

d. Pelaksanaan koordinasi urusan Keamanan, Kebersihan, Ketertiban Keindahan, dan Keselamatan (K5) dalam kawasan pelabuhan perikanan
e. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan meliputi : mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk Kapal Perikanan berukuran paling kecil 10 (sepuluh) *gross tonnage*; memiliki dan/ atau memanfaatkan dermaga paling pendek 100 (seratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 2 (dua) meter; mampu menampung Kapal Perikanan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 3O0 (tiga ratus) *gross tonnage*; dan memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 5 (lima) hektar ; terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; dan terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya;
f. Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan;
g. Pelayanan dokumen distribusi ikan;
h. Pelayanan logistik dan perbekalan;
i. Pelayanan retribusi penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
j. Fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
k. Penyelenggaraan wisata Bahari;
l. Pengelolaan ketatausahaan; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala Pelabuhan.
   Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A
b. Subbagian Tata Usaha.
   Bertugas menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan; menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan; menyiapkan pengelolaan keuangan; menyiapkan pengelolaan kepegawaian; menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ; menyiapkan kerja sama dan kehumasan; menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
   Melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas : Kelompok Kerja Operasional

Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

d. Unit Penunjang
   Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Sentra Pendaratan Ikan dan Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, menyinergikan dan mengendalikan operasional pengelolaan pelabuhan perikanan pantai dengan melaksanakan fungsi :

a. Pelayanan tambat labuh bongkar muat dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
b. Pelaksanakan pemantauan usaha di bidang perikanan tangkap;
c. Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil tangkapan ikan
d. Pelaksanaan koordinasi urusan Keamanan, Kebersihan, Ketertiban; Keindahan, dan Keselamatan (K5) dalam kawasan pelabuhan perikanan
e. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pelabuhan perikanan meliputi : mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di Perairan Indonesia, memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk Kapal Perikanan berukuran paling kecil 1 (satu) *gross tonnage*, memiliki dan/ atau memanfaatkan dermaga paling pendek 100 (seratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter, mampu menampung Kapal Perikanan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*, memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 2 (dua) hektar dan terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari,
f. Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan,
g. Pelayanan dokumen distribusi ikan,
h. Pelayanan logistik dan perbekalan;
i. Pelayanan retribusi penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
j. Fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
k. Penyelenggaraan wisata bahari;
l. Pengelolaan ketatausahaan; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B terdiri atas:

a. Kepala Pelabuhan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha. Tugas tersebut meliputi:

a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
b. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
c. Menyiapkan inspeksi pembongkaran ikan;
d. Menyiapkan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB);
e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
f. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
g. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
h. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
i. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
j. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
k. Menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan;
l. Menyiapkan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
m. Pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha;
n. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
o. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
p. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana;
q. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;
r. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha; dan
s. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Subbagian Tata Usaha.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:

a. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
b. Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
c. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;
d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum;
e. Menyiapkan pengelolaan kepegawaian;

f. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
g. Pengelolaan barang milik Daerah;
h. Menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
i. Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelabuhan Perikanan;
k. Pelaksanaan pelayanan masyarakat perikanan; dan
l. Pelaksanaan pengendalian lingkungan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

6. Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A.

Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan perikanan budidaya. dengan melaksanakan fungsi:

a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan budidaya ikan, produksi induk dan calon induk unggul, produksi benih bermutu, kelestarian sumber daya ikan dan penelitian;
b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan budidaya ikan, produksi induk dan calon induk unggul, produksi benih bermutu, kelestarian sumber daya ikan dan penelitian;
c. Evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan budidaya ikan, produksi induk dan calon induk unggul, produksi benih bermutu, kelestarian sumber daya ikan dan penelitian;
d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A terdiri atas:

a. Kepala Balai.
   Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
b. Subbagian Tata Usaha.
   Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:
   1. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
   2. Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;

3. Kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
4. Menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
5. Menyiapkan pengelolaan keuangan;
6. Menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. Menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;
8. Menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
9. Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
10. Menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Balai dan;
11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kelompok Kerja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya.Tugas tersebut meliputi :
1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan diseminasi perikanan budidaya;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan diseminasi perikanan budidaya;
3. menyiapkan pelaksanaan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kepada pembudidaya air tawar, payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan Masyarakat;
4. menyiapkan pembinaan dan temu teknis produksi kepada pembudidaya air tawar, payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan Masyarakat;
5. menyiapkan produksi calon induk dan benih ikan air tawar, payau dan laut;
6. menyiapkan pemuliaan ikan budidaya air tawar, payau dan laut;
7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang produksi dan diseminasi perikanan budidaya;
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kelompok Kerja Kemitraan dan Pelayanan Usaha
1. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Kemitraan dan Pelayanan Usaha;
2. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Kemitraan dan Pelayanan Usaha;
3. Menyiapkan penyebarluasan informasi teknologi budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
4. menyiapkan pelayanan jasa konsultasi teknis kepada pembudidaya ikan tawar, payau dan laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan Masyarakat

5. Menyiapkan pelayanan usaha penjualan induk, calon induk, benih dan produksi budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan dan Pelayanan Usaha;
7. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
f. Unit Penunjang
   Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

7. Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A.

Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengelolaan Kesehatan Ikan dan bidang Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan dengan melaksanakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian, pengelolaan Kesehatan ikan dan kelayakan produk hasil perikanan;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian, pengelolaan kesehatan ikan dan kelayakan produk hasil perikanan;
c. evaluasi, dan pelaporan bidang pengujian, pengendalian hama dan penyakit dan pengujian dan penerapan mutu produk hasil perikanan;
d. pengelolaan ketatausahaan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Organisasi Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A, terdiri atas :

a. Kepala Balai.
   Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A.
b. Subbagian Tata Usaha.
   Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas tersebut meliputi:
   1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
   2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;

3. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
5. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah ;
7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kelompok Kerja Pengelolaan Kesehatan Ikan.
Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Kesehatan Ikan. Tugas tersebut meliputi :
1. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan;
2. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
3. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan;
4. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
5. Menyiapkan penyebarluasan informasi teknologi mengatasi hama dan penyakit;
6. Memonitoring dan menganalisa residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan ikan;
7. Mengawasi peredaran bahan kimia maupun obat-obatan;
8. Monitoring, survailance dan menganalisa resiko akibat hama penyakit ikan;
9. Menganalisa dan mengevaluasi kerugian akibat hama penyakit ikan;
10. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan; dan
11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Ketua Kelompok Kerja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan
Bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan. Tugas tersebut meliputi :
1. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penerapan dan kelayakan produk hasil perikanan;
2. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penerapan dan kelayakan produk hasil perikanan;

3. Menyiapkan pengujian penerapan dan kelayakan hasil perikanan secara laboratoris terhadap produk produk pengolahan dan hasil perikanan (mikrobiologi, organoleptik dan kimia);
4. Menyiapkan pengembangan kemampuan pengujian sesuai tuntutan pasar;
5. Menyiapkan sistem manajemen laboratorium produk hasil perikanan;
6. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang penerapan dan kelayakan produk hasil perikanan;
7. Menyiapkan inspeksi penerapan cara pengolahan yang baik dan prosedur operasional standar sanitasi;
8. Menyiapkan monitoring hasil perikanan pada unit pengolahan ikan dan suplier (air, es, kesegaranbahan baku, dan residu bahan kimia berbahaya)
9. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang penerapan dan kelayakan produk hasil perikanan dan;
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

f. Unit Penunjang
Unit penunjang merupakan unit organisasi non struktural berupa Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.

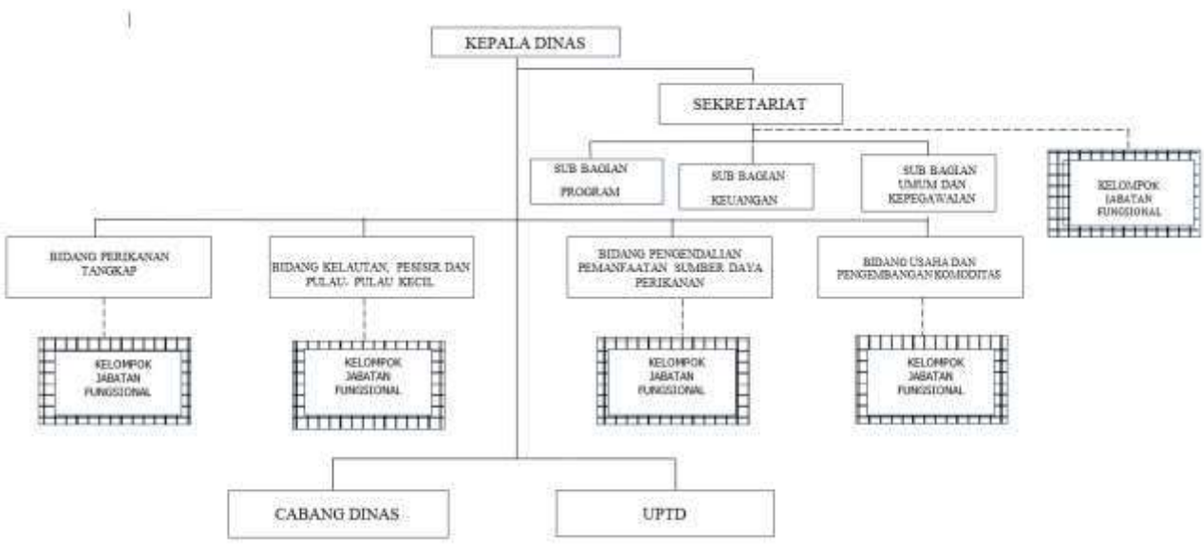

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

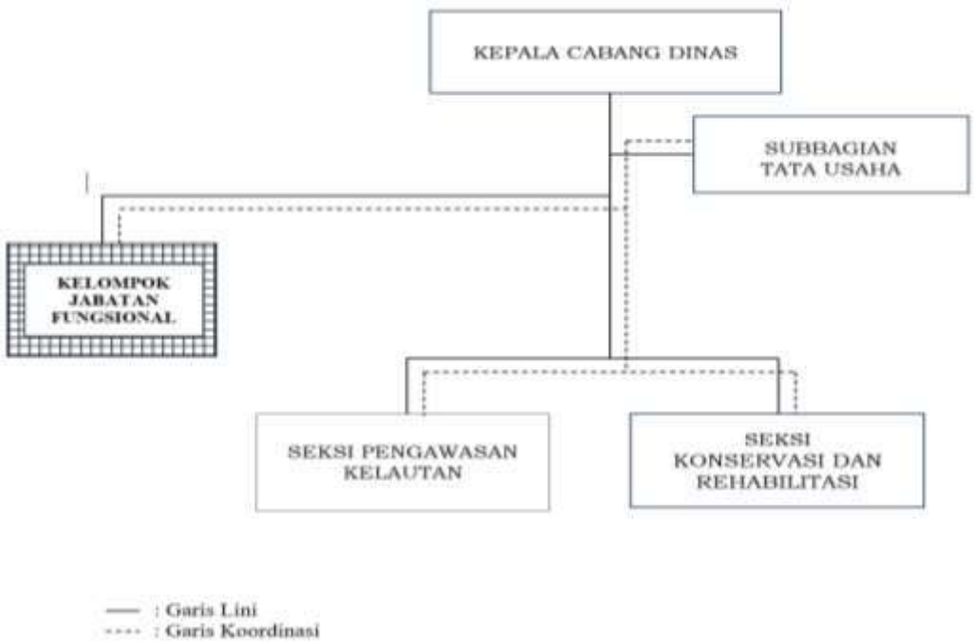

Gambar 2.2. Bagan Organisasi Cabang Dinas Kelautan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

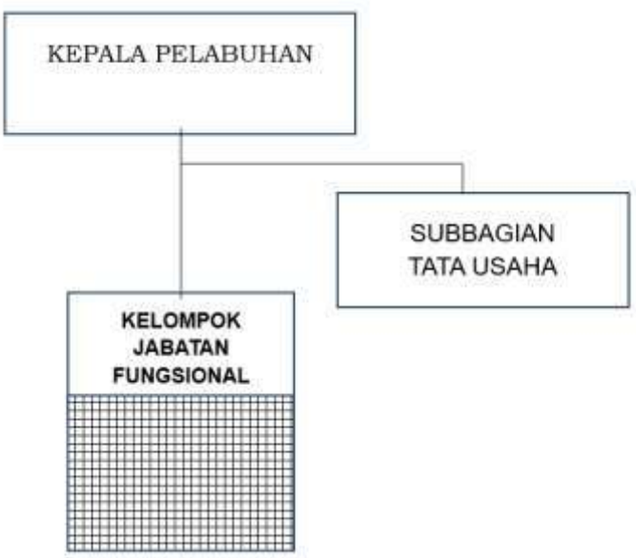

Gambar 2.3. Bagan Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

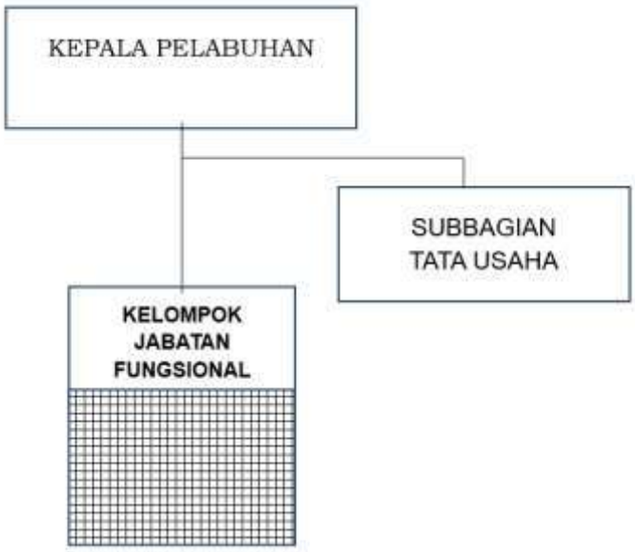

Gambar 2.4. Bagan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

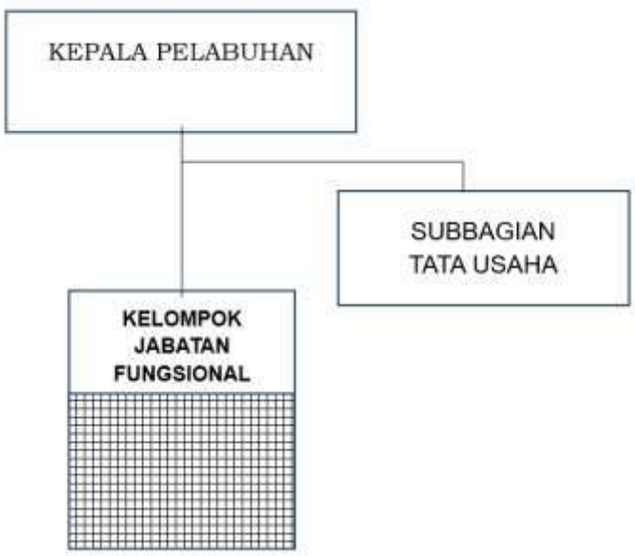

Gambar 2.5. Bagan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

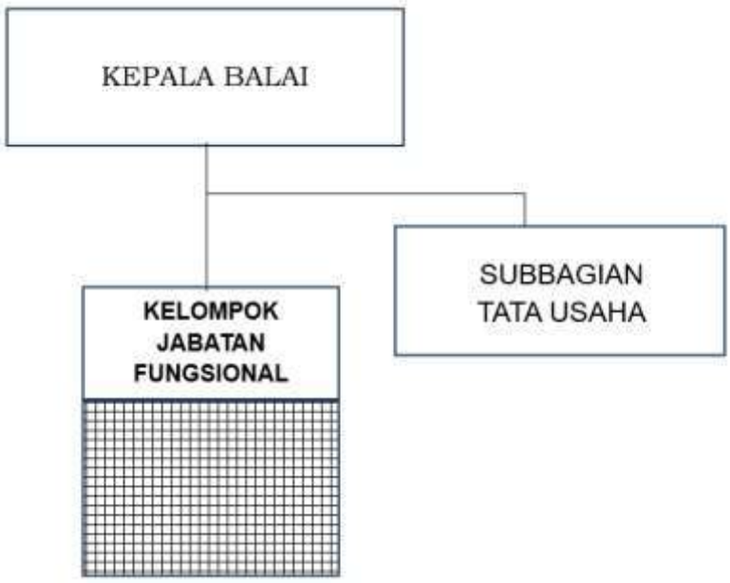

Gambar 2.6. Bagan Organisasi Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

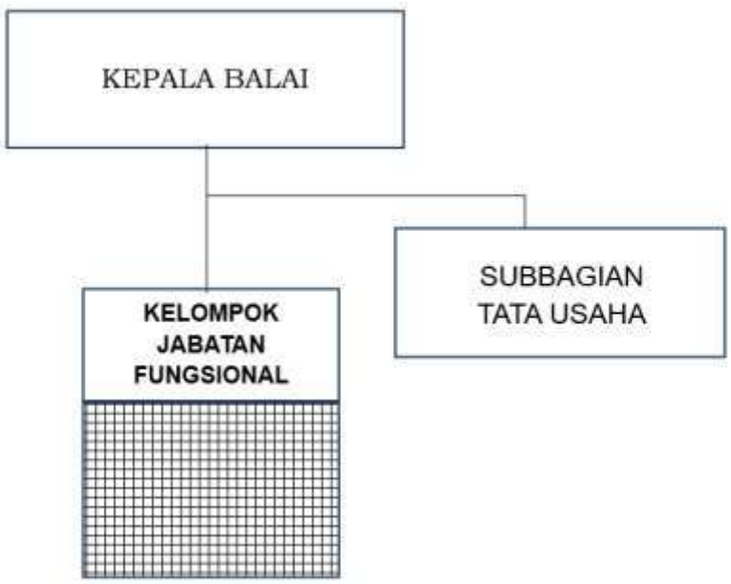

Gambar 2.7. Bagan Organisasi Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

2.2. SUMBERDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

2.2.1. Jumlah Pegawai

Pada tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pegawai sebanyak 253 orang. Sejumlah pegawai tersebut tersebar di seluruh bidang dan UPT dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.a, dapat diketahui bahwa berdasarkan golongannya jumlah pegawai Golongan I berjumlah 5 orang, Golongan II sebanyak 25 orang, Golongan III sebanyak 167 orang dan Golongan IV sebanyak 27 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai yang lulusan SD adalah 7 orang, SLTP sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 53 orang, Sarjana Muda sebanyak 16 orang, S1/DIV sebanyak 126 orang, S2 sebanyak 38 orang dan S3 sebanyak 2 orang. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah 2024

NO	INSTANSI	JUMLAH	I				II				III				IV				PPPK
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	63					1		2	2	7	12	5	14	6	5		1	8
2	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI	13				3				1	4	1	1	2	1				
3	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KLIDANGLOR	7							1					3	1				2
4	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK	5												2	1				2
5	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BAJOMULYO	8									1	1		3	1				2
6	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TASIKAGUNG	5											1	2	1				1
7	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LOHGENDING	9	1								1		1	3	1				2
8	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LARANGAN	8				1				2	2		1	2					
9	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI WONOKERTO	6									1	1		1	1				2
10	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI ASEMDOYONG	6							1		2			3					
11	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAWANG	5							1		1			1					2
12	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA	9				1						4	1	2					1
13	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH BARAT	8										6		2					
14	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH TIMUR	14								2	2	4		4	2				

NO	INSTANSI	JUMLAH	I				II				III				IV				PPPK
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
15	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH SELATAN	10								1		3	1	5					
16	BALAI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU LAUT	18							2			3	2	7	1	1			2
17	BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	43					1	2	2	1	6	13	4	8	1				5
18	BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	16						1			1	5	1	5	3				
	JUMLAH	253	1	0	0	5	2	3	9	9	28	53	18	69	20	6	0	1	29

Sumber : DKP Jateng, 2024

2.2.2. Aset/Modal

Sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara bertahap terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hingga Januari 2024, secara umum prasarana kerja berupa gedung perkantoran yang sudah milik sendiri antara lain: balai budidaya, laboratorium, kapal inspeksi perikanan, mobil laboratorium keliling dan mobil Gemarikan. Berikut ini merupakan Tabel 1.3. mengenai aset/modal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan sarana dan prasarana penunjang kinerja.

Tabel 2.2

Aset/Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m^2)	Tahun Penga-daan	Letak/ alamat	Pengguna-an	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	14012	1986	Jl. Veteran No. 2 KAB. CILACAP	Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Kebumen	
2	TANAH.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	564	1980	Ds. Gunung simping , Kec.Cilacap, KAB. CILACAP	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL	
3	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	930	1988	Jl. Ksatrian, Karangkobar, Sokanegara, KAB. BANJARNEGARA	DINLUTKAN PROV. JATENG	
4	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	20000	2012	Ds. Singosari Kec. Karangwelas KAB. BANYUMAS	BPBIAT Muntilan	
5	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	20000	2012	Ds. Tambaksogra Kec. Banyumas KAB. BANYUMAS	BPBIAT Muntilan	
6	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	90939	2016	DESA PASIR ,Pasir.Ayah.KAB. KEBUMEN	DERMAGA DAN TPI	
7	TANAH.TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA / JASA.TANAH BANGUNAN DERMAGA	41742	2016	DESA PASIR ,Pasir.Ayah.KAB. KEBUMEN	DERMAGA	
8	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	29510	1985	Jl Kerkop No. 1 Ds. Muntilan Kec. Muntilan KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Muntilan MGL	
9	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	10405	1994	Ds. Sawangan , Kec. Sawangan , KAB. MAGELANG	BPBIAT Muntilan	
10	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	11540	1994	Ds. Sawangan , Kec. Sawangan , KAB. MAGELANG	BPBIAT Muntilan	
11	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	9720	1987	Ds. Ngrajek , Kec. Mungkid , KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL	
12	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	43990	1987	Ds. Ngrajek , Kec. Mungkid , KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL	
13	TANAH.TANAH KOSONG YANG SUDAH DIPERUNTUKKAN	100	2007	Ds. Parimono, Kec.Mungkid , Kab. Magelang, KAB. MAGELANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ngrajek MGL	
14	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR	28425	1981	Ds. Janti , Kec. Polanharjo , KAB.	Perbenihan dan Budi Daya Ikan	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m^2)	Tahun Penga-daan	Letak/ alamat	Pengguna-an	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	PEMERINTAH			KLATEN	Air Tawar Janti di Klaten	
15	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	600	1997	Ds. Ngabean Kec. Kartosuro Kab Sukoharjo,Ngabeyan.Kartasura.KAB. SUKOHARJO	DINLUTKAN PROV. JATENG	
16	TANAH.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	2207	1958	Jl. Diponegoro No. 90,Tasikagung KAB. REMBANG	Rumah dinas	
17	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	7405	1996	Ds. Tasikagung , Kec. Rembang, KAB. REMBANG	PPP TASIKAGUNG REMBANG	
18	TANAH.TANAH BANGUNAN POS JAGA/MENARA JAGA	7875	2004	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	POSKAMLADU	
19	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	222	2009	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG		
20	TANAH.TANAH BANGUNAN PASAR	222	2012	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG		
21	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	222	2012	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG		
22	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT	4086	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	KBT	
23	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT	14456	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	PEKARANGAN KBT	
24	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	6359	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	TPI TASIKAGUNG	
25	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	3045	2014	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	JALAN TPI	
26	TANAH.TANAH BANGUNAN TERMINAL LAUT	14311	2016	DESA TASIKAGUNG, Kec. Rembang.KAB. REMBANG	KAWASAN PPP	
27	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	5751	1987	Ds. Jatisari Kec. sluke KAB. REMBANG	PIAP SLUKE REMBANG	
28	TANAH.TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30	2011	DESA SLUKE KEC. SLUKE REMBANG KAB. REMBANG	TANAH UNTUK INSTALASI AIR BERSIH PIAP SLUKE	
29	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1997	1991	JL. SOEDIRMAN 12A PLANGITAN, KAB. PATI	CABANG DINAS KELAUTAN WIL TIMUR	
30	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	26570	2012	Ds. Pengkolan Kec. Margoyoso KAB. PATI	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
31	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	1220	1990	JL. Achmad Dahlan, Kec.Karimunjawa, KAB. JEPARA	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KARIMUNJAWA	
32	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	9570	1990	JL. Achmad Dahlan, Kec.Karimunjawa, KAB. JEPARA	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KARIMUNJAWA	
33	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR	1415	2009	Jl. Cik Lanang Jepara, Jobokuto KAB.	Ex Kantor Cabang Dinas Jepara	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m^2)	Tahun Penga-daan	Letak/ alamat	Pengguna-an	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	PEMERINTAH			JEPARA		
34	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	9296	2013	Karimunjawa KAB. JEPARA	Tanah Untuk Penampungan Air Tawar PPP Karimunjawa	
35	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	3000	2014	JL. AE SURYANI,Bulu, KAB. JEPARA	TANAH UNTUK TPI BULU JEPARA	
36	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	1940	1990	Jl. Achmad Dahlan, Kec. Karimunjawa KAB. JEPARA	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KARIMUNJAWA	
37	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	25110	2005	DS. Bulu Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
38	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	25710	2005	DS. Bulu Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
39	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	22200	2005	Ds. Kauman Kec jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
40	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	20090	2005	Ds. JoboKuto Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
41	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	1500	2012	Ds. Bandengan Kec. Jepara KAB. JEPARA	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
42	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	19480	2014	DESA JOBOKUTO KEC. JEPARA, KAB. JEPARA	TANAH TAMBAK JOBOKUTO JEPARA	
43	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	8000	2014	DESA JOBOKUTO KEC. JEPARA, KAB. JEPARA	TAMBAK JOBOKUTO JEPARA	
44	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	1155	2014	DESA BULU KEC. JEPARA JEPARA KAB. JEPARA	TANAH UNTUK TAMBAK BULU JEPARA	
45	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	16160	2014	DESA KAUMAN KEC. JEPARA JEPARA KAB. JEPARA	TANAH TAMBAK KAUMAN JEPARA	
46	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	40000	1980	Ds. tambak bulusan kec. karang tengah KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
47	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	13185	2001	Ds. Purworejo Kec. Bonang KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
48	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	18419	2001	Ds. Morodemak Kec. Bonang KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
49	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	22496	2001	Ds. Berahan Wetan Kec Wedung KAB. DEMAK	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
50	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	39698	2016	PURWOREJO BONANG, Morodemak. KAB. DEMAK	PELABUHAN	
51	TANAH.TANAH	500	1988	Ds. Nyatnyono , Kec.	DINLUTKAN	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m^2)	Tahun Penga-daan	Letak/ alamat	Pengguna-an	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III			Ungaran, KAB. SEMARANG	PROV. JATENG	
52	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	9510	1995	Ds. Pojoksari, Kec. Ambarawa, KAB. SEMARANG	Perbenihan dan Budi Daya Ikan Tawar Ambarawa SMG	
53	TANAH.TANAH NON PERSIL LAINNYA	22420	1998	Ds. Turunrejo , Kec. Brangsong, KAB. KENDAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
54	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	7738	2014	DESA GEMPOLSEWU KEC. ROWOSARI, KAB. KENDAL	KANTOR KAWASAN PPP TAWANG KENDAL	
55	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	12360	1988	Ds. Karangasem, Kec. Batang, KAB. BATANG	TPI KLIDANG LOR	
56	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1600	1989	Ds. Karangasem, Kec.Batang, KAB. BATANG	PPP KLIDANG LOR	
57	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	225	1991	Ds.Kedungsegog, Kec. Tulis, KAB. BATANG	TPI ROBAN	
58	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1010	1991	Ds. Kebondalem, Kec. Gringsing, KAB. BATANG	TPI SIKLAYU	
59	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	250	1993	Ds. Kedawung,Kec. Limpung, KAB. BATANG	TPI CELONG	
60	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	450	2016	KARANGASEM KAB. BATANG	KANTOR	
61	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	10360	2017	WUKIRSARI, KAB. BATANG	TAMBAK	
62	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	11040	1994	Ds. Sejomerto , Kec. Roban, KAB. BATANG	BBI SEJOMERTO	
63	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	725	1988	Ds. Sugih waras, Kec. Pemalang, KAB. PEMALANG	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) ASEMDOYONG	
64	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	19842	1995	Ds. Lawangrejo Kec. Pemalang, KAB. PEMALANG	BBIAPL TUGU	
65	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	21110	2012	Ds Pesantren Kec. Ulujami KAB. PEMALANG	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
66	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	20235	2016	DS ASEMDOYONG,Taman , KAB. PEMALANG	PELABUHAN ASEMDOYONG	
67	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	15300	2003	Ds. Banjaranyar , Kec. Randudongkal KAB. PEMALANG	BBI RANDUDONGKAL	
68	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	1600	1993	JL BANDENG MUNJUNGAGUNG, KAB. TEGAL	CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH BARAT	
69	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	190	1993	Ds. Mujungagung , Kec. Kramat, KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
70	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG	21400	2016	Ds. Mujungagung , Kec. Kramat, KAB.	PPI LARANGAN	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m^2)	Tahun Penga-daan	Letak/ alamat	Pengguna-an	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	PELELANGAN IKAN			TEGAL		
71	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	91940	1989	Ds. Maribaya Kec. Kramat KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
72	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	25000	2012	Ds. Kedung Kelor Kec. Marib KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
73	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	22250	2012	Ds. Kedung Kelor Kec. Marib KAB. TEGAL	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau Marib	
74	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	685	1995	Ds. Brebes , Kec. Brebes, KAB. BREBES	DINLUTKAN PROV. JATENG	
75	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	320	1987	Ds. Wates , Kec. Magelang Utara, KOTA MAGELANG	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Munt	
76	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1301	1985	Jl. Imam Bonjol No. 130,Sekayu,.Semarang Tengah, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
77	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	1272	1985	Jl. Imam Bonjol No. 130,Sekayu,.Semarang Tengah, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
78	TANAH.TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	496	2001	Jl. Trunojoyo X/23 A Banyumanik Banyumanik.KOTA SEMARANG	RUMDIN DINLUTKAN PROV. JATENG	
79	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	2885	2002	Jl. Imam Bonjol No. 134 Sekayu, Semarang Tengah, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
80	TANAH.TANAH KOSONG YANG SUDAH DIPERUNTUKKAN	855	2015	Jl. Sisingamangaraja No. 77, Wonotinggal, Candisari, KOTA SEMARANG	RUMDIN	
81	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	25180	1990	Ds. Mangunharjo, Kec. Tugu, KOTA SEMARANG	DINLUTKAN PROV. JATENG	
82	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	5922	2001	Ds. Karanganyar, Kec. Tugu, KOTA SEMARANG	Budidaya Ikan Air Payau Karanganyar SMG	
83	TANAH.TANAH TAMBAK/EMPANG/KOLAM IKAN/AKUARIUM	37114	2001	Ds. Karanganyar, Kec. Tugu, KOTA SEMARANG	Budidaya Ikan Air Payau Karanganyar SMG	
84	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	692	1988	Jl. Mpu Tantular No. 2, Bandarharjo, Semarang Utara, KOTA SEMARANG	BALAI KARANTINA DAN KESEHATAN IKAN	
85	TANAH.TANAH BANGUNAN LABORATORIUM	2320	1978	Jl. Siliwangi No. 636, Krapyak, Semarang Barat, KOTA SEMARANG	LPPMHP SEMARANG	
86	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	13485	1993	Ds. Panjangwetan, Pekalongan Utara, KOTA PEKALONGAN	BPPI WONOKERTO	
87	TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	2000	1977	Ds. Panjangwetan, Pekalongan Utara, KOTA PEKALONGAN	LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL P	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (m^2)	Tahun Penga-daan	Letak/ alamat	Pengguna-an	Ket
1	2	3	4	5	6	7
88	TANAH.TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GDG.TEMPAT TINGGAL.LAIN-LAIN	5480	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PERUM KOMPLEK JONGOR	
89	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	7720	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PUSAT PENDARATAN IKAN	
90	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	43160	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PUSAT PENDARATAN IKAN	
91	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	36688	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PELELANGAN IKAN	
92	TANAH.TANAH BANGUNAN GEDUNG PELELANGAN IKAN	11520	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	PUSAT PENDARATAN IKAN	
93	TANAH.TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA / JASA.TANAH BANGUNAN DERMAGA	50406	2002	PPP TEGALSARI, TEGAL BARAT.KOTA TEGAL	DERMAGA	

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah berupa sarana informasi portal berupa *website* dengan alamat akses http://dkp.jatengprov.go.id, Email: dkp@jatengprov.go.id, facebook: dkpjateng; Twitter @dkpjateng; Instagram @dkpjateng; youtube : dkpjateng. Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

2.2.3. PROFIL UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berikut ini adalah gambaran profil Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) yang berada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

1. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) DAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KELAS A

Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

UPT PPN Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 2 (Dua) unit, UPT PPP Kelas A berjumlah 4 (Empat) unit yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Berikut ini adalah gambaran umum PPN dan PPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah :

1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kota Tegal

PPP Tegalsari secara geografis terletak pada koordinat 06°51'-06°52' LS dan 109°09'-109°10' BT di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Fasilitas-fasilitas yang dimilki PPP Tegalsari antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Breakwater, Revetment, training Jetty, Dermaga bongkar, Dermaga tambat labuh, Alur masuk pelabuhan, Kolam labuh, Kolam perbekalan, Jalan Penghubung).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Fasilitas Pendaratan Ikan (Bangunan TPI dan Tempat Pengepakan), Fasilitas Navigasi (Pelayaran dan Komunikasi, Rambu Suar, Suar Penuntun, Telepon), Fasilitas Suplai Air dan BBM (Reservoir, Sumur Artesis, Jaringan Air Bersih, SPBN (Dikelola KUD "Karya Mina"), Catu Daya Listrik, Gardu Induk Listrik dan Travo, Jalan dan Saluran, Gorong-gorong), Pabrik Es (Kap.8 ton/hari), Chilling Room/Gold Storage (Kap.30 ton), Drainase).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Administrasi (Kantor PPP Tegalsari, Kantor Syahbandar, dan Poskamladu), Bangunan Serbaguna dan lainnya (Balai Pelatihan Nelayan (SUPM), Mess Operator, Toilet Umum, Kios Pedagang (*Cofish*), Kios Pedagang Swadana, Kios Pedagang (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (*Cofish*), Tempat Pengepakan Ikan (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (Swadana), Gerbang Pelabuhan, Gedung Pabrik Tepung Ikan, Tempat Parkir, Ruko Swadana, Unit Pengolah Limbah (UPL), Tempat Fillet Ikan (Swadana), Pos Portal, Tempat Perbaikan Jaring, Kontainer Sampah, Excavator, Ponton / Tongkang)

2) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasik Agung Kabupaten Rembang

PPP Tasik Agung secara geografis terletak pada 111°000'-111°030' BT dan 6°30'-7°00' LS di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tasik Agung antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN 30.000 liter, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)

  Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK (6x3m), Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

3) Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Kabupaten Batang

PPP Klidang Lor secara geografis terletak pada koordinat 6°53'11"LS-109°44'55"BT di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Klidang Lor antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: *Break water*, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).

- Fasilitas Fungsional (meliputi: Kantor PPP, Kantor Syahbandar, TPI, Lantai Lelang, Instalasi listrik, Sound System, SPDN, Instalasi air bersih, Menara suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kamar mandi/WC, Kios, Areal pengepakan ikan, Kereta dorong, Kolam labuh, Koperasi, Klinik Kesehatan, Pompa air).

4) Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kabupaten Demak

PPP Morodemak secara geografis terletak pada koordinat 110°32'40"BT dan 6°49´30"LS di Dukuh Kongsi Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Morodemak antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur Pelayaran, Dermaga Bongkar, Dermaga fender, Dermaga perbekalan, Breakwater barat, Breakwater timur, Talud sheet pile,Talud beton, Kapal perikanan, Groin, dan Jalan Kompleks)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung TPI, Kantor TPI, Air bersih, Pos satpolair, Kantor ppp, Tempat perbaikan jaring)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kios, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling).

5) Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kabupaten Pati

PPP Bajomulyo secara geografis terletak pada koordinat 111°8'30"BT dan 6°42'30" di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Bajomulyo merupakan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Pati antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung lelang, Reservoir, Tower, Listrik PLN, Genset, SPBB, SPDN, Sound Sistem).
- Fasilitas Penunjang, meliputi:
  - ✓ Unit I (Gedung Pertemuan, MCK umum, Gudang basket, Pos Jaga, Eks kantor UPBI, Cold storage, Musholla, Ruang genset, Area parkir, Pagar keliling)
  - ✓ Unit II (Gedung lelang, Pasar bangsal, Pengepakan ikan, Listrik PLN, Gedung Basket, MCK, Areal parkir depan tempat lelang, Lampu penerangan dermaga, Gedung pos jaga dan doorlup, Drainase induk, Kios perdagangan umum, Kantor Airud, SSB Pos Jaga, Gapura dan Pagar, Pagar Bangunan Lelang, Kantor pengawasan).

6) Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kabupaten Kebumen

PPP Logending secara geografis terletak pada 111°000'-111°030' BT dan 6°30'-7°00' LS di Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Logending antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK, Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

PPP Logending mempunyai 2 (dua) sentra pendaratan ikan yaitu :

a. Sentra Pendaratan Ikan Pasir Kabupaten Kebumen
   Sentra Pendaratan Ikan Pasir terletak di Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Adapun fasilitas yang di SPI Pasir antara lain: Rumah mesin, Tempat Parkir, Balai Pertemuan, dan Kantor SAR.
b. Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat Kabupaten Cilacap
   Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat terletak di Jl. Veteran No. 2 Kabupaten Cilacap. SPI Sentolokawat memiliki fasilitas berupa Tempat Pendaratan Ikan, SPDN (Solar Package Dealer Nelayan), dan Tempat Penjemuran Ikan

2. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KELAS B

Dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
c. evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
d. pengelolaan ketatausahaan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

UPT PPP Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 5 (lima) unit yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Berikut ini adalah gambaran umum PPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah:

1) *Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kabupaten Pemalang*

PPP Asemdoyong secara geografis terletak pada koordinat 8˚53'30''-7˚20'11'' LS dan 109°17'30''-109°40'30'' BT di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Fasilitas-fasilitas yang dimilki PPP Asemdoyong antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Saluran Drainase dan Turap/Revetment).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, Menara Air, SPDN, CBIP, Kios, Instalasi Listrik, Tempat Pengolahan, Tempat Penjemuran ikan).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai luas, Kantor Satker Pelabuhan luas, Kantor Pos Pengawasan Lanal TNI luas, Pondok Boro Nelayan, Mushola, MCK (kondisi sedang), Kantor Kesehatan Pelabuhan, Warung makan dan kios, Pertokoan, dan Tempat parkir motor).

2) *Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan*

PPP Wonokerto secara geografis terletak pada koordinat 6°54‘16‘ LS dan 109°42“BT di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Fasilitas-fasilitas yang dimilki PPP Wonokerto antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Talud/Turap, Lahan PPI, Jalan Lingkungan, Menara Suar, Kolam Pelabuhan dan Breakwater).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, SPDN, Instalasi Listrik, Instalasi Air Bersih, dan Menara Suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal Parkir, Tempat Penjemuran Ikan, Tempat Penjemuran Alat Tangkap, Kamar Mandi/WC, Kios/Los Pertokoan, Pondok Boro, dan Mushola).

3) *Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kabupaten Kendal*

PPP Tawang secara geografis terletak pada koordinat 6˚55'0,3"LS dan 110°02'49,7"BT di Desa Gempolsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tawang antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Break water, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).
- Fasilitas Fungsional (meliputi : TPI/lantai lelang, Instalasi listrik, Air bersih (artetis dan PDAM), Kantor, SPDN, Pabrik es curah mini, (*Containerized Block Ice Plant*, Genset, Sound system, Menara suar, Rambu pengaman di muara))
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parker, Kantor Kamladu, Kios ikan, Kamar mandi/WC, Mushola, Pos Jaga).

4) *Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kabupaten Jepara*

PPP Karimunjawa secara geografis terletak pada koordinat 5°51'50"LS dan 110°26'08" BT di Tanjung Benteng Desa/Pulau Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Karimunjawa antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung Kantor, TPI, Gedung Pabrik Es, Bengkel, Resevoar Air Tawar, Genset, Radio SSB)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Administrator, Mess Operator 3 kopel)/ Renovasi, Mess Operator).

5) *Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kabupaten Tegal*

PPP Larangan secara geografis terletak pada koordinat 6°51'41.530"LS dan 109°11'33.572" BT di Desa Munjung Agung Kec.Kramat, Kab. Tegal. Sebagai salah satu UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 47 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha.

3. Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A

Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A (BKIKHP) merupakan gabungan dari dua UPT yaitu Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan (BLPKIL) dan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP). Terletak di Jl. Jl. Siliwangi No.636, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50184.

BKIKHP Kelas A telah memiliki Sertifikat Akreditasi KAN dengan No : LP-1120-IDN yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2017 sebagai Laboratorium yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi.

Wilayah kerja Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A meliputi seluruh Jawa Tengah. Jenis layanan di BKIKHP, antara lain;

1. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).
2. Pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan secara laboratoris.
3. Kegiatan tanggap darurat terkait wabah penyakit ikan
4. Pembinaan dan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan di 35 Kab/Kota

5. Pembinaan pada Unit Pengolahan Ikan
6. Kesesuaian hasil proses sertifikasi

4. Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A

Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A terletak di Desa Tugu Kecamatan Tugu, Kota Semarang. BIAP Karanganyar memiliki luas tambak 3,4 Ha dan luas bangunan 5.000 m2. Fasilitas di BIAP Karanganyar antara lain: Luas lahan produktif berupa 4 petak tambak untuk budidaya; 2 petak kecil tambak untuk pendederan (penampungan air), dengan luas total lahan ± 4 Ha. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut membawahi 3 (tiga) Loka Budidaya Air Payau, meliputi: Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya Tegal, Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Rembang dan Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara.

a. Loka BIAP Maribaya Tegal

Loka Budidaya Ikan Air Payau (BIAP) Maribaya berada di Jl. Raya Beringin Km 10 Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Loka Budidaya Ikan Air Payau (BIAP) Maribaya memiliki luas lahan tambak yang produktif ± 18.800 m2 yang terdiri dari 5 petakan tambak plastik HDPE, dan 3 petakan tambak tanah lumpur. Tambak ini dimanfaatkan untuk pembesaran udang vanname ukuran konsumsi

b. Loka PIAP Sluke Rembang

Loka Perbenihan Ikan Air Payau (PIAP) Sluke terletak di Desa Jatisari Kecamatan Sluke. Loka PIAP Sluke berdiri di atas tanah seluas 5.751 m^2 yang dimanfaatkan untuk gedung kantor, hatchery, bak filter air, dll. Fasilitas di Loka BIAP Sluke antara lain:

- 1 (satu) gedung kantor
- 1 (satu) labotarorium pakan alami
- 1 (satu) bak induk udang kapasitas 10 ton
- 2 (dua) bak induk bandeng kapasitas 200 ton
- 1 (satu) bak induk indoor kapasitas 40 ton
- 1 (satu) bak kultur massal plankton outdoor
- 10 (sepuluh) bak beton outdoor kapasitas 8 ton
- 2 (dua) reservoir air laut 100 ton

c. Loka PBIAL Karimunjawa Jepara

Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara terletak di Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara. Loka PBIAL Karimunjawa memiliki luas lahan sebesar 10.000 m^2 dan Luas Bangunan sebesar 150 m^2. Fasilitas di PBIAL Karimunjawa antara lain;

- Hatchery ukuran 5 x 2 m sebanyak 5 bak
- Bak ukuran 2,5 x 2,4 m sebanyak 12 unit
- Bak bulat volume 30 ton sebanyak 1 unit
- Bak bulat volume 15 ton sebanyak 2 unit
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 35 petak produksi
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 6 petak pembenihan
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 10 petak calon induk

- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 9 petak konsumsi

d. Loka PBI Ambarawa

Loka PBI Ambarawa terletak di Jl. Pemuda No. 94 Temanggungan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Luas lahan Loka PBI Ambarawa adalah 9.150 m2 yang terdiri dari 6.000 m2 untuk kolam dan 3.150 m2 untuk bangunan, antara lain: gedung kantor. hatchery, laboratorium, dan mushola.

e. Loka PBI Muntilan

Loka PBI Muntilan terletak di Jl. Kerkof No. 1 Desa Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Luas lahan Loka PBI Muntilan adalah 29.000 m2 dengan luas kolam 16.127 m2 dan luas bangunan 2.554 m2. Fasilitas yang ada di Loka PBI Muntilan antara lain: gedung kantor, rumah dinas, asrama, mushola, aula, dan perpustakaan.

f. Loka PBI Ngrajek

Loka PBI Ngrajek terletak di Jl. Mayor Kusen Km. 4 Kelurahan Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Luas area di Loka PBI Ngrajek adalah 5,3 ha. Fasilitas yang ada di Loka PBI Ngrajek antara lain: gedung kantor, asrama, mushola, dan aula.

Berawal dari nama Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Ngrajek, yang berlokasi di Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan ketinggian 340 meter di atas permukaan air laut. Dibangun pada tahun 1962 dan arealnya diperluas pada tahun 1964 menjadi 5,3 hektar. Sumber air berasal dari 2 (dua) mata air yaitu Mudal dan Combrang, dengan debit 54 liter/dt pada daerah pangkal saluran dan 5 liter/dt pada daerah ujung saluran. Orientasi awal yang tetap menjadi andalan Loka Ngrajek hingga saat ini adalah penyediaan benih ikan air tawar unggul dan tahan penyakit seperti: Tawes, Karper Merah Cangkringan dan Majalaya, Lele (Dumbo, Sangkuriang, dan Phyton), Nila (Hitam dan Merah), Grasscarp, Patin, dan Nilem dan calon induk ikan air serta penyedian induk unggul ikan lele yang dapat menghasilkan benih unggul dan tahan penyakit. Selain melaksanakan pelayanan penyediaan benih dan induk unggul Loka Ngrajek juga menyediakan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Ngrajek juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock karper dan lele; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

g. Loka PBI Janti

Loka PBI Janti terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Luas Loka Janti adalah 2,84 ha, dengan luas kolam 1,7

ha, bangunan dan ruang terbuka 0,98 ha saluran 0,16 m. Fasilitas yang terdapat di Loka Janti antara lain gedung kantor, asrama, dan mushola.

Loka Janti terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Dibangun pada tahun 1979 di atas lahan seluas 2,89 hektar. Luas kolam 1,7 hektar (60%), bangunan dan ruang terbuka 0,98 hektar (30%) dan saluran 0,21 hektar (10%), dengan ketinggian tempat 203 meter di atas permukaan air laut. Sumber air berasal dari Umbul Nilo dan Umbul Wunut melalui saluran irigasi teknis yang mengalir sepanjang tahun dengan debit berkisar 25-40 l/dt dan kualitas yang cukup baik sehingga ideal bagi kegiatan perbenihan ikan.

Loka Janti memiliki tugas sebagai Pusat Pengembangan Induk Ikan Nila Regional (PPIINR) yang ditetapkan berdasarkan SK. Dirjen Perikanan Budidaya NO. 6378/DPB –1/-PB. 110. D1/12/03 sebagai perpanjangan tangan terhadap Pusat Pengembangan Ikan Nila Nasional (PPIIN) yang berpusat di Sukabumi. Dengan tugas utama memperbaiki mutu genetik untuk induk dan benih ikan nila.

Selain melaksanakan pelayanan penyediaan induk unggul ikan nila, Loka Janti juga menyediakan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Janti juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock Nila; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

h. Loka PBI Randudongkal

Loka PBI Randudongkal terletak di Jl. Raya Randudongkal - Moga Km. 2 Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Luas tanah loka PBI Randudongkal adalah 1,5 ha terdiri dari luas bangunan 252 m^2, luas kolam 6.300 m^2 dengan jumlah 24 kolam.

i. Loka PBI Singasari

Loka PBI Singasari terletak di Jalan Raya Singasari, Dusun II, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Luas loka PBI Singasari adalah 2 ha dengan luas kolam 0,5 ha.

Fasilitas yang ada di Loka PBI Singasari antara lain: gedung kantor, asrama, aula, dan mushola.

j. Pos PBI Tambaksogra

Pos PBI Tambaksogra terletak di Jl. Dusun III Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Luas Pos PBI Tambaksogra adalah 2 ha dengan luas kolam 1.2 ha. Sarana dan prasarana yang terdapat di pos PBI Tambaksogra antara lain: gedung kantor, mushola, dan aula.

Pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 26 Februari bernama Loka PBIAT Tambaksogra yang menjadi wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntilan Magelang). Kemudian pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.47 tahun 2018 berubah menjadi Loka Tambaksogra dibawah Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Semarang.

Loka Tambaksogra terletak di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Memiliki luas tanah 20.000 m2 dengan luas bangunan 783 m2. Luas kolam 10.680 m2 dengan jumlah kolam 26 petak. Menyediakan pelayanan calon induk unggul gurami dan benih ikan air tawar serta pengujian kesehatan ikan dan lingkungan. Pelayanan pengujian kesehatan ikan meliputi pemeriksaan klinis parasit, jamur, bakteri, dan virus, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan molekuler. Selain pelayanan pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan, Loka Tambaksogra juga dapat melakukan kerjasama dalam bentuk:

1. Penelitian;
2. Magang;
3. Pelatihan;
4. Pengembangan broodstock Gurame; dan
5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan penyakit ikan dan pemeriksaan parameter lingkungan.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir merupakan penjabaran daari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam 2 (dua) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan 2024-2026.

Sasaran strategis Renstra 2018-2023 meliputi:

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan.
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis Renstra 2024-2026 meliputi :

1. Meningkatnya produksi perikanan
2. Meningkatnya produksi garam
3. Meningkatnya angka konsumsi ikan
4. Meningkatnya nilai tukar nelayan
5. Meningkatnya nilai tukar pembudidaya ikan
6. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan partisipatif
7. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan Risiko Perangkat Daerah

Selain berdasarkan Sasaran Strategis, kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengacu pada indikator kinerja tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Kelautan dan Perikanan.

Formulasi pengukuran kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target kuantitatif sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis tersebut. *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**RENSTRA PD TAHUN 2018-2023**																			
A.	**Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB**																			
	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sector perikanan	Persen	-	-	-	1,20	1,30	1,40	1,5		4,73	-2,30	6,43	4,91		406	100	100	327,33	
B	**Terwujudnya Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan**																			
	Produksi Perikanan	Ton/Tahun	-	-	-	1.010.738,93	945.678,64	1.018.833,92	1.023.928,09		918.790,37	864.706,75	891.539,49	940.013		90,90	85,30	87,50	91,80	
	Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah	Kg/Kap/Thn	-	-	-	33,85	32,05	38,18	37,07		36.21	36,74	38,83	39,38		106,97	114,63	97,56	106,23	
	Produksi Garam	Ton/Tahun	-	-	-	338.742,22	355.679,33	373.463,29	652.969,04		375.074,56	197.623,92	135.792,09	652.969,05		110,73	55,56	36,36	100	
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	-	-	-	106	106	107	108		107,18	112,21	104,86	99,79		101,11	104,87	97,09	92,39	
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Angka	-	-	-	101	101	101	101		109,88	110,09	109,95	110,53		108,79	109	109,95	109,43	
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan																			

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungj awab dan Berkelanjutan																			
	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persen	-	-	-	70	75	75	72		70	75	75	75		100	100	100	100	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-	62	64	80	81		82,5	82,5	84,25	87		133,06	121,32	105,31	107,40	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																			
	Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	-	-	-	69	69,5	80	81		81,3	81,34	83,44	83,55		117,56	117,04	104,30	103,14	
C	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**																			
	Produksi perikanan tangkap	Ton/tahun	-	-	-	496.346,93	497.833	500.322,17	502.823,78		433.277,37	330.293,06	333,361.47	396.079		87,29	66,35	66,29	78,77	
	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	-	-	-	-	-	0,10	0,10		-	-	0,04	0,10		-	-	40	100	
	Program Pengelolaan																			

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Perikanan Budidaya																			
	Produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun	-	-	-	514.392	515.932	518.522,75	521.104,31		485.513	516.369,07	533.011,18	543.934		94,39	100,08	102,28	104,38	
	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	-	-	-	-	-	0,20	0,20		-	-	0,20	0,40		-	-	100	200	
	Persentase Peningkatan Produksi Benih	Persen	-	-	-	10	15	2	25		38,13	15	2,5	25		381,3	100	125	100	
	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	Persen	-	-	-	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan																			
	Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan	Persen	-	-	-	10	15	2	25		3,27	15	7,2	37,61		32,7	100	356	150,44	
	Persentase Peningkatan Dokumen Kelayakan Mutu	Persen	-	-	-	20	15	2	50		0	15	2	72,9		0	100	100	145,8	
	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																			
	Persentase Peningkatan Produksi Garam	Persen	-	-	-	5	5	0,10	25		5,54	-29,85	0,05	37,99		110,8	-597	50	151,96	
	persentase Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan	Persen	-	-	-	0	2,5	2,5	17,6		0	2,5	2,5	17,6		0	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	yang efektif																			
	persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir	Persen	-	-	-	10	1	5	30		0	39,8	5	30		0	398	100	30	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya di wilayah selatan Jawa Tengah	Persen	-	-	-	1	1	1	25		1	1	1	38,63		100	100	100	154,52	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya di wilayah barat Jawa Tengah	Persen	-	-	-	1	1	1	25		1	1	1	38,63		100	100	100	154,52	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya di wilayah timur Jawa Tengah	Persen	-	-	-	0,5	0,5	0,5	25		0,5	0,5	0,57	30,43		100	100	114	121,72	
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha wilayah selatan Jawa	Persen	-	-	-	1	1	1	1		1	1	1	1,08		100	100	100	108	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Tengah																			
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha wilayah barat Jawa Tengah	Persen	-	-	-	1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha wilayah timur Jawa Tengah	Persen	-	-	-	1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	100	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		-	-	-															
	persentase jumlah pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	-	2	3	-	-		2	3	2	2		100	100	100	100	
	Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan	Persen	-	-	-	-	-	71	72		-	-	71	72		-	-	100	100	
	Persentase peran aktif kelompok masyarakat	Persen	-	-	-	-	-	40	45		-	-	40	45		-	-	100	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	pengawas dalam pengawasan sdkp																			
	persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah	Persen	-	-	2	8	6	2	2		8	6	2	2		100	100	100	100	
	persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai barat Jawa Tengah	Persen	-	-	2	8	6	2	2		6	6	2	2		75	100	100	100	
	persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai timur Jawa Tengah	Persen	-	-	2	8	6	2	2		6	6	2	2		75	100	100	100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat	Persen	-	-	-	100	100	100	100		92,76	100	100	100		92,76	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	daerah																			
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Persen	-	-	-	100	100	100	100		99,30	100	100	100		99,30	100	100	100	
B	**RENSTRA PD TAHUN 2024-2026**																			
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan																			
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Persen								1					1					100
2	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan																			
	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Persen								108					105					97
3	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan																			
	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	Pesen								0,75					1					100
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah																			
	Indeks Reformasi	Angka								82					82					100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Birokrasi (Perangkat Daerah)																			
	PROGRAM																			
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL																			
	Persentase produksi garam	Persen								1					1					100
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Persen								5					5					100
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	Persen								3,7					3,7					100
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	Persen								1,39					2,56					184,17
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	Persen								3,7					3,7					100
	PROGRAM																			

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																			
	Persentase produksi perikanan tangkap	Persen								5					3,7					74
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka								108,27					101,41					93,66
	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	Persen								44,44					44,44					100
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	Persen								72					72					100
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong	Persen								72,72					72,72					100
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	Persen								81,82					90,91					111,11
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	Persen								70					70					100
	Persentase	Persen								62,62					72,72					116,13

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang																			
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	Persen								81					81					100
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	Persen								100					100					100
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	Persen								100					100					100
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	Persen								63,63					90,9					142,86
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	Persen								63					63					100
	Persentase ketercapaian	Persen								72					72					100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan																			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																			
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	Persen								100					100					100
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut	Persen								5					5					100
	Produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun								600.000					554.810,13					92,47
	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka								111,27					131,6					118,27
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																			
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	Persen								70					73					104,29
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah	Persen								2					2					100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	kerja Cabdin Wilayah Barat																			
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	Persen								61					61					100
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	Persen								2					0,8					250
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	Persen								61					64,5					105,74
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan	Persen								2					2					100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur																			
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	Persen								61					61					100
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																			
	Jumlah produksi olahan ikan	Ton								160.000					299.838,50					187,4
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	Persen								4					4					100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi																			
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Persen								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum,	Persen								100					100					100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah																			

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sektor Kelautan dan Perikanan

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada Renstra 2018-2023 yaitu "meningkatnya laju pertumbuhan PDRB", dengan indikator kinerja adalah laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan. Target kinerja pada tahun 2019 sebesar 1% terealisasi 4,42% dengan capaian kinerja 442%, target tahun 2020 sebesar 1,2% dengan realisasi 4,88% dan mendapatkan capaian kinerja 406%, target tahun 2021 sebesar 1,3% terealisasi 1,3% dengan capaian kinerja 100%, target 2022 sebesar 1,4% terealisasi 1,4% dan mendapatkan capaian kinerja 100%.

Dalam mencapai target kinerja pada tujuan Renstra 2018-2023, Dinas Kelautan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

1) Terwujudnya Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan
2) Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan
3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1) Sasaran strategis pertama yaitu Terwujudnya Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan, di implementasikan melalui beberapa program dan kegiatan guna menunjang pencapaian beberapa indikator sasaran strategis dengan penjabaran sebagai berikut:
   a) Produksi Perikanan

      Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki target produksi perikanan tahun 2019 sebesar 857.758,41 ton/tahun, terealisasi sebesar 1.095.042,22 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 127,66%. Target produksi perikanan tahun 2020 sebesar 1.010.738,93 ton/tahun, dengan realisasi sebesar 918.790,37 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 90,90%. Target produksi perikanan tahun 2021 sebesar 945.678,64 ton/tahun, dengan realisasi sebesar 864.706,75 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 85,30%. Target produksi perikanan tahun 2022 sebesar 1.023.928,09 ton/tahun, terealisasi sebesar 866,372.65* ton/tahun dengan capaian kinerja 85,03% dan target produksi perikanan tahun 2023 sebesar 1.023.928,09 ton/tahun.

      Capaian produksi perikanan 2020-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 97,22%, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui beberapa program penunjang sebagai berikut:

      i) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

         Target indikator kinerja pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap meliputi persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan tangkap.

         Indikator persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 memiliki target 0,10% dan terealisasi 0,04% dengan capaian kinerja 40%, pada tahun 2023 memiliki target 0,10%.

Indikator produksi perikanan tangkap memiliki target pada tahun 2019 sebesar 393.150 ton/tahun terealisasi 526.750,22 ton/tahun dengan capaian kinerja 133,98%, pada tahun 2020 sebesar 496.346,93 ton/tahun terealisasi 433.277,37 ton/tahun mendapatkan capaian kinerja 87,29%, pada tahun 2021 memiliki target 2021 sebesar 497.833 ton/tahun terealisasi 330.293,06 ton/tahun dengan capaian kinerja 66,35%, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 500.322,17 ton/tahun terealisasi 333.361,47 ton/tahun mendapatkan capaian kinerja 66,29% dan target pada tahun 2023 sebesar 502.823,78 ton/tahun.

Capaian produksi perikanan tangkap sepanjang tahun 2020-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 88,48%, upaya guna pencapaian melalui kegiatan pengembangan sarana Pelabuhan perikanan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas nelayan serta pemberian bantuan sarana dan prasana penangkapan ikan kepada nelayan. Adapun tidak tercapainya target produksi perikanan tangkap disebabkan oleh penurunan sumber daya ikan di daerah laut Jawa dikarenakan *over exploitation*, serta menurunnya aktivitas penangkapan ikan akibat dari kenaikan BBM pada tahun 2022 dan juga kondisi cuaca yang buruk yaitu musim gelombang yang terjadi cukup lama (musim barat) disertai dengan angin kencang yang menyebabkan nelayan tidak berani melaut karena berisiko tinggi. Produksi perikanan tahun 2024 terealisasi 968.353,80 ton dari target 927.350 ton sehingga persentase realisasi sebesar 104,42%. Komponen penyusun produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap tahun 2024 terealisasi 413.543,67 ton dari target 327.350 ton sehingga persentase realisasi sebesar 126,33%. Realisasi produksi perikanan tangkap melebihi target disebabkan beberapa faktor, yaitu:

a. Implementasi kebijakan Perikanan Ikan Terukur (PIT) ditunda sampai 31 Desember 2025 sehingga nelayan dapat mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan asal.
b. Adanya petugas enumerator dari Kementrian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas mendata jumlah ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor, Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo dan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.
c. Cuaca atau iklim pada tahun 2024 relatif aman terkendali sehingga nelayan (kapal besar) dapat melaut untuk menangkap ikan.

Namun terkait belum optimalnya pengelolaan produksi perikanan tangkap terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

a. Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang dimiliki nelayan/kelompok nelayan.
b. Masih rendahnya kesadaran pengurusan izin perikanan tangkap.
c. Kondisi overfishing di WPP 712 dan 573 yang menjadi kewenangan provinsi.
d. Relatif tingginya unreported produksi hasil tangkapan/hasil tangkapan yang tidak dilaporkan atau tercatat.
e. Masih belum optimalnya pengamanan daerah asuhan ikan (jalur 1a atau 0-2 mil) dari alat tangkap aktif bermesin.

Permasalahan yang dihadapi adalah penerapan peraturan Penangkapan Ikan Terukur memberikan dampak positif dan negatif. Positifnya membuat produksi perikanan tangkap meningkat, disisi lain setelah diwajibkan bongkar muat di pelabuhan pangkalan maka produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah akan menurun karena sebagian besar berasal dari wilayah Timur Indonesia atau Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718; terjadinya penurunan SDI di laut Jawa; terjadinya pendangkalan alur dan muara sungai serta kolam pelabuhan yang menghambat keluar-masuk kapal perikanan; infrastruktur dan sarpras pelabuhan yang terganggu air rob maupun yang rusak dan perlu diperbaiki. Upaya mengatasi antara lain mengusulkan kegiatan melalui DAK dengan menu sarpras pelabuhan, penenggelaman terumbu karang buatan, pembuatan rumah ikan, pengusulan pembelian excavator terapung; pemberian hibah alat tangkap yang ramah lingkungan dan dilakukannya gerai-gerai perizinan di lokasi nelayan. Manfaat dari program tersebut adalah terjagannya SDI di Laut Jawa, meningkatnya pelayanan pelabuhan perikanan, meningkatnya retribusi dari sektor penangkapan ikan, terpenuhinya kebutuhan melaut para nelayan, terjaminnya keselamatan kerja nelayan kecil, dan terpenuhinya persyaratan perizinan nelayan.

ii) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Target indikator kinerja pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya meliputi persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya, persentase peningkatan produksi benih, persentase penanganan kasus hama penyakit ikan.

Indikator persentase pertumbuhan perikanan budidaya pada tahun 2022 memiliki target sebesar 0,20% dengan realisasi 0,20% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target penanaman pada tahun 2023 sebesar 0,10%.

Pada tahun 2020 memiliki target sebesar 514.392 ton/tahun, terealisasi 485.513 ton/tahun mendapatkan capaian kinerja 94,39%. Pada tahun 2021 memiliki target sebesar 515.932 ton/tahun terealisasi 516.369,07 ton/tahun dengan capaian kinerja 100,08%. Pada tahun 2022 memiliki target sebesar 518.522,75 ton/tahun dengan realisasi

533.011,18 dan mendapatkan capaian kinerja 102,28% serta target penanaman pada tahun 2023 sebesar 521.104,31 ton/tahun.

Indikator persentase peningkatan produksi benih pada tahun 2019 memiliki target sebesar 5% terealisasi 37,1% dengan capaian kinerja 742%. Pada tahun 2020 memiliki target sebesar 10%, terealisasi 38,13% mendapatkan capaian kinerja 381,3%. Pada tahun 2021 memiliki target sebesar 15% terealisasi 15% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2022 memiliki target sebesar 2% dengan realisasi 2,5% dan mendapatkan capaian kinerja 125% serta target penanaman pada tahun 2023 sebesar 25%.

Indikator Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan Pada tahun 2020 memiliki target sebesar 100%, terealisasi 100% mendapatkan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2021 memiliki target sebesar 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2022 memiliki target sebesar 100% dengan realisasi 100% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target penanaman pada tahun 2023 sebesar 100%.

Capaian kinerja didukung oleh upaya yang dilakukan antara lain melalui penggunaan induk dan benih unggul dalam proses produksi pembudidayaan ikan, pengendalian hama penyakit ikan, pelaksanaan sertifikasi penerapan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta berkembangnya teknologi perikanan budidaya antara lain teknologi Bioflock.

Produksi perikanan budidaya tahun 2024 terealisasi 554.810,13 ton dari target 600.000 ton sehingga persentase realisasi sebesar 92,47%. Realisasi produksi perikanan budidaya tidak tercapai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Musim kemarau di Triwulan III dan awal Triwulan IV di beberapa kabupaten/kota yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air untuk kegiatan budidaya.
2. Harga jual ikan di tingkat pembudidaya yang cenderung menurun (komoditas lele) karena masuknya produk perikanan dari luar provinsi dengan harga yang lebih murah, daya beli masyarakat yang cenderung menurun, sehingga mengakibatkan pembudidaya membatasi jumlah tebar ikan untuk menghemat operasional.
3. Terdapat alih fungsi lahan di Kabupaten Kendal yang semula lahan tambak menjadi industri.
4. Terdapat upwelling di Waduk Mulur Kabupaten Sukoharjo yang seharusnya ikan akan di panen di Triwulan IV.
5. Terdapat musibah banjir di Kabupaten Demak pada awal tahun yang mengakibatkan beberapa kolam dan hasil budidaya hanyut.

Permasalahan yang dihadapi adalah musim kemarau di Triwulan III dan awal Triwulan IV di beberapa Kabupaten/Kota yang menyebabkan

berkurangnya ketersediaan air untuk kegiatan budidaya; harga jual ikan di tingkat pembudidaya yang cenderung menurun (komoditas lele) karena masuknya produksi perikanan dari luar provinsi dengan harga yang lebih murah, daya beli masyarakat yg cenderung menurun, sehingga mengakibatkan pembudidaya membatasi jumlah tebar ikan untuk menghemat operasional, terdapat alih fungsi lahan di Kab. Kendal yang semula lahan tambak menjadi industri, terdapat upwelling di Waduk Mulur Kab. Sukoharjo yang seharusnya ikan akan di panen di Triwulan 4, terdapat musibah banjir di Kab. Demak pada awal tahun yang mengakibatkan beberapa kolam dan hasil budidaya hanyut; masih sulitnya pemenuhan persyaratan sertifikasi CPIB, CBIB bagi pembudidaya ikan skala kecil; menurunnya kapasitas loka-loka budidaya dan perbenihan ikan; belum seluruh wilayah Jawa Tengah dapat dimonitor hama dan penyakit ikan secara rutin. Upaya mengatasi dengan mendorong pengembangan pakan mandiri melalui pemberian hibah mesin pembuat pakan; revitalisasi loka-loka budidaya melalui anggaran DAK; pemberian hibah sarpras budidaya; pendampingan sertifikasi CPIB dan CBIB; serta melakukan monitoring hama penyakit ikan secara kolektif. Manfaat dari program tersebut adalah penurunan kasus hama penyakit ikan, meningkatnya kualitas bibit ikan dan optimalnya produksi perikanan budidaya.

b) Tingkat Konsumsi Ikan Jawa Tengah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menetapkan target dalam Renstra 2020-2023 Target tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 33,85, dengan realisasi 36,21 dan mendapatkan capaian kinerja 106,97%. Target tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 32,05, terealisasi sebesar 36,74 dengan capaian kinerja 110,73%. Target tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 38,18, dengan realisasi sebesar 37,25 dan mendapatkan capaian kinerja 85,03%. Target tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 37,07.

Angka konsumsi ikan di Jawa Tengah tahun 2024 terealisasi 40,12 kg/kap/tahun dari target 40,12 kg/kap/tahun sehingga persentase realisasi sebesar 100%. Realisasi angka konsumsi ikan masih bersifat sementara karena belum di validasi Tingkat nasional. Angka konsumsi ikan di Jawa Tengah tahun 2024 masih berada di bawah target angka konsumsi ikan secara nasional tahun 2024 yaitu sebesar 62,50 kg/kap/tahun. Rendahnya angka konsumsi ikan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: perubahan tren konsumen, keberlanjutan usaha poklahsar dan pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat membuat pelatihan kurang relevan dan kurang efektif. Tindak lanjut yang perlu dilakukan diantaranya mengembangkan strategi pemasaran yang komprehensif dan memantau pasar secara aktif, pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan, sosialisasi dan pendampingan pemenuhan persyaratan cara pengolahan ikan yang baik, sosialisasi dan kampanye Gemarikan serta kolaborasi dengan stakeholder terkait.

Capaian tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah tahun 2020-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 103.31%, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan penjelasan sebagai berikut :

Target kinerja pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan dan persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu.

Indikator persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan pada tahun 2020 memiliki target sebesar 10% dengan realisasi 3,27% dan mendapatkan capaian kinerja 32,7%, pada tahun 2021 memiliki target sebesar 15%, terealisasi 15% dengan capaian kinerja 100%, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 2% dengan realisasi 7,2% dan mendapatkan capaian kinerja 356% serta target pada tahun 2023 sebesar 25%.

Indikator persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu pada tahun 2020 memiliki target sebesar 20% dengan realisasi 0% dan mendapatkan capaian kinerja 0%, pada tahun 2021 memiliki target sebesar 15%, terealisasi 15% dengan capaian kinerja 100%, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 2% dengan realisasi 2% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target pada tahun 2023 sebesar 50%.

Capaian kinerja didukung dengan upaya pencapaian melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas poklahsar, pemberian bantuan sarana dan prasarana poklahsar, pembinaan SKP serta pembinaan penerapan sanitasi dan higienis pada UPI, kampanye Gemarikan dan FORIKAN.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih kecilnya unit pengolah ikan yang bersertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) atau cara pengolahan ikan yang baik; masih adanya penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya serta rendahnya konsumsi ikan masyarakat. Adapun upaya mengatasi dengan melakukan pembinaan penerapan GMP kepada unit pengolah ikan skala kecil; dan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN). Manfaat dari program tersebut adalah meningkatnya daya saing produk perikanan serta peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan.

c) Produksi Garam

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memiliki target dalam Renstra 2020-2023 pada indikator produksi garam Target produksi tahun 2020 sebesar 338.742,22 ton/tahun, dengan realisasi sebesar 375.074,56 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 110,73%. Target produksi garam tahun 2021 sebesar 355.679,33 ton/tahun, terealisasi sebesar 197.623,92 ton/tahun dengan capaian kinerja 55,56%. Target produksi garam tahun 2022 sebesar 373.463,29 ton/tahun, dengan realisasi sebesar 135.792,09 ton/tahun dan mendapatkan capaian kinerja 36,36%. Target produksi garam pada tahun 2023 sebesar 392.136,46 ton/tahun.

Capaian produksi garam sepanjang tahun 2020-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 112,155%, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui

program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan rincian sebagai berikut :

Target kinerja pada Program Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi persentase peningkatan produksi garam dengan target target pada tahun 2020 sebesar 5% dengan realisasi 5,54% dan mendapatkan capaian kinerja 110,8%, target pada tahun 2021 sebesar 5% terealisasi -29,85% dengan capaian kinerja -597%, target pada tahun 2022 sebesar 0,10% dengan realisasi 0,05% dan mendapatkan capaian kinerja 50% serta target pada tahun 2023 sebesar 25%.

Guna mendukung pencapaian kinerja dilakukan upaya antara lain melalui sosialisasi dan pengembangan kapasitas kugar, serta pemberian bantuan sarana dan prasrana produksi garam rakyat. Capaian peningkatan produksi garam sangat dipengaruhi pada faktor cuaca dikarenakan adanya musim kemarau basah, dimana musim kemarau disertai hujan sehingga menyebabkan mayoritas petambak garam hanya memproduksi sedikit garam dan bahkan tidak berproduksi, selain itu terjadinya pandemi Covid-19 dengan aturan pembatasan aktifitas petambak juga menyebabkan produksi garam merosot tajam.

Tingkat produksi garam tahun 2024 terealisasi 629.952,95 ton dari target 133.320 ton sehingga persentase realisasi sebesar 472,51%. Realisasi produksi garam melebihi target memberikan kontribusi produksi garam secara nasional sebesar 31,50%. Faktor yang mendukung tercapainya target yang ditetapkan yaitu adanya dukungan anggaran yang memadai, dukungan instansi terkait di Kabupaten serta peran serta stakeholder terkait. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan yaitu adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan peningkatan produksi garam terkait dengan perbaikan atau pembangunan infrastruktur berupa sungai dan irigasi tambak garam serta jalan produksi. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi infrastruktur, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana serta dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum di provinsi maupun kabupaten.

d) Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memiliki target dalam Renstra 2020-2023. Target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2020 sebesar 106, dengan realisasi sebesar 107,18 dan mendapatkan capaian kinerja 101,11%. Target Nilai Tukar Nelayan tahun 2021 sebesar 106, terealisasi sebesar 112,21 dengan capaian kinerja 104,87%. Target Nilai Tukar Nelayan tahun 2022 sebesar 107, dengan realisasi sebesar 104,86 dan mendapatkan capaian kinerja 97,09% serta target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2023 sebesar 108. Capaian Nilai Tukar Nelayan sepanjang tahun 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 100,50%.

Pada tahun 2024, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai nilai tertinggi 102,46 pada bulan Maret-April. Namun mengalami penurunan pada bulan Mei dan mencapai titik terendah pada bulan September sebesar 99,67. NTN mengalami peningkatan kembali pada bulan Oktober sampai Desember. NTN bulan Desember tercatat sebesar 101,41.

e) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memiliki target dalam Renstra 2020-2023. Target Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada tahun 2020 sebesar 101, dengan realisasi sebesar 109,88 dan mendapatkan capaian kinerja 108,79%. Target Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2021 sebesar 101, terealisasi sebesar 110,09 dengan capaian kinerja 109%. Target Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2022 sebesar 101, dengan realisasi sebesar 109,95 dan mendapatkan capaian kinerja 109,95% serta target Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada tahun 2023 sebesar 101. Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan sepanjang tahun 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 109,06%.

Pada tahun 2024 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) cukup fluktuatif dimana nilai tertinggi mencapai 107,45 pada bulan November. Nilai NTPi terendah tercatat sebesar 100,79 pada bulan Mei. Pada Bulan Januari NTPi (107,26) mengalami penurunan sampai dengan bulan Mei kemudian mengalami peningkatan pada bulan Juni sampai Desember. NTPi bulan Desember tercatat sebesar 107,34.

2) **Sasaran strategis kedua yaitu** "Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan" diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan guna menunjang pencapaian beberapa indikator sasaran strategis dengan penjabaran sebagai berikut:

a) Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki target persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. target pada tahun 2020 sebesar 70%, dengan realisasi sebesar 70% dan mendapatkan capaian kinerja 100%, target pada tahun 2021 sebesar 75%, terealisasi sebesar 75% dengan capaian kinerja 100%, target pada tahun 2022 sebesar 75%, dengan realisasi sebesar 75% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target pada tahun 2023 sebesar 72%.

Capaian persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tahun 2020-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 100%, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui program sebagai berikut:

i) Program Pengelolan Ruang Pesisir dan Laut

Target kinerja pada Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut meliputi persentase kawasan konservasi yang ditata menuju

pengelolaan yang efektif, persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir, persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya dan persentase peningkatan verifikasi perizinan unit usaha.

Indikator persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif memiliki Target pada tahun 2021 sebesar 2,5% dengan realisasi 2,5% dan mendapatkan capaian 100%. Target pada tahun 2022 sebesar 2,5%, terealisasi 2,5% dengan capaian kinerja 100%, dan target pada tahun 2023 sebesar 17,6%. Upaya guna pencapaian target kinerja meliputi pelaksanaan koordinasi, fgd serta updating RZWP3K.

Indikator persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir memiliki Target pada tahun 2021 sebesar 1% dengan realisasi 39,8% dan mendapatkan capaian 398%. Target pada tahun 2022 sebesar 5%, terealisasi 5% dengan capaian kinerja 100%, dan target pada tahun 2023 sebesar 30%. Upaya pencapaian target kinerja meliputi pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Indikator persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya pada tahun 2020-2022 Cabang Dinas Kelautan (CDK) Wilayah Selatan dan CDK Wilayah Barat memiliki target sebesar 1%, terealisasi 1% dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan pada CDK Wilayah Timur pada tahun 2020-2022 memiliki target sebesar 0,5%, pada tahun 2019-2021 terealisasi 0,5% dengan capaian kinerja 100%, pada tahun 2022 terealisasi 0,57% mendapatkan capaian kinerja 114%. Pada tahun 2023 seluruh CDK memiliki target sebesar 25%. Upaya guna pencapaian target kinerja meliputi pelaksanaan sosialisasi ekosistem mangrove, penanaman mangrove, penanaman cemara laut dan mangrove for education.

Permasalahan yang dihadapi antara lain kesulitan pemilihan lokasi penanaman mangrove dengan status tanah negara yang bisa ditanami; lokasi penanaman mangrove yang belum siap untuk ditanam bibit mangrove; dan jenis tanah yang sesuai untuk penanaman mangrove. Upaya mengatasi dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder yang menangani mangrove, membuka kesempatan CSR penanaman mangrove pada perusahaan; perencanaan dan persiapan penanaman lebih awal untuk mengatasi lahan yang tidak siap ditanami dan mencari lokasi yang cocok untuk jenis-jenis mangrove. Manfaat dari program tersebut adalah peningkatan produktivitas garam rakyat dan menaikkan daya dukung serta menanggulangi kerusakan ekosistem pesisir.

Indikator persentase peningkatan verifikasi perizinan unit usaha seluruh CDK pada tahun 2020-2023 memiliki target sebesar 1%, dengan realisasi pada tahun 2020-2023 1% dan mendapatkan capaian kinerja 100%. Upaya guna pencapaian target kinerja meliputi pelaksanaan sosialisasi perijinan, pendampingan pengurusan ijin dan penerbitan rekomendasi teknis.

ii) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan persentase jumlah pelanggaran pengelolaan

Target kinerja pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi persentase jumlah pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang ditindaklanjuti, persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan, persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp.

Indikator persentase jumlah pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang ditindaklanjuti target pada tahun 2020 sebesar 2% dengan realisasi 2% dan mendapatkan capaian kinerja 100%, target pada tahun 2021 sebesar 3% terealisasi 3% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2022 indikator ini berubah menjadi persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan dan persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp.

Indikator persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan memiliki target pada tahun 2022 sebesar 71% dengan realisasi 71% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target pada tahun 2023 sebesar 72%. Indikator persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp memiliki target pada tahun 2022 sebesar 40% dengan realisasi 40% dan mendapatkan capaian kinerja 100% serta target pada tahun 2023 sebesar 45%. Capaian indikator program tersebut sepanjang tahun 2019-2023 menghasilkan rata-rata sebesar 100% melalui dukungan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemulihan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Realisasi persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan tahun 2024 sebesar 62% sehingga persentasenya sebesar 100% atau kategori sangat tinggi. WPPNR I yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) telah dilakukan di dua WPP yang ada di Jawa Tengah yaitu WPP 712 laut Jawa di wilayah pantura (pantai Utara dari Kab. Brebes sampai Kab. Rembang) dan WPP 573 Samudera Hindia di wilayah Pantai Selatan (pantai Selatan Kab. Wonogiri sampai Kab. Cilacap). Pengawasan selain dilakukan oleh aparat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan juga dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Permasalahan dalam Kegiatan Pengawasan SDKP sampai dengan 12 mil dan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah

Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah di Jawa Tengah adalah:

1. Masih belum optimalnya pengurusan perizinan berusaha pada sektor kelautan dan perikanan khususnya kategori Mikro dan Kecil, meskipun perizinan berusaha tersebut bisa terbit otomatis.
2. Belum optimalnya Pengawasan perizinan berusaha berbasis Resiko sektor Kelautan dan perikanan pasca diundangkannya Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dengan masih banyaknya pengunaan alat penangkapan ikan (API) yang tidak ramah lingkungan / yang dilarang seperti arad (mini trawl), bolga / purse seine waring, sodo (push net) dengan kapal dan alat penangkap ikan jenis garuk kerang yang masih banyak beroperasi di jalur Ia, sehingga potensi konflik antar nelayan masih banyak terjadi, potensi konflik semakin tinggi pasca diterbitkannya Permen KP nomor 36 tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penagkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat.
4. Masih adanya penggunaan formalin sebagai bahan tambahan pengawet produk perikanan terutama pada produk kering.
5. Belum adanya regulasi level daerah tentang Pengenaan Sanksi Administratif.

Pemecahan masalah dalam kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelangggaran Pengelolaan SDKP di Jawa Tengah adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam percepatan, pertukaran data dan informasi tentang perizinaan berusaha berbasis resiko dan termasuk kegiatan Pengawasannya.
2. Optimalisasi kearifan lokal terhadap penggunaan alat ramah lingkungan dan Sosialisasi larangan pengunaan alat penangkapan ikan dan ketaatan pelaku usaha kelautan dan Perikanan terhadap perundangan yang berlaku dengan penegasan tentang sanksi pidana terhadap ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Optimalisasi sosialisasi dan pengawasan larangan penggunaan formalin mulai dari dalam proses penanganan ikan diatas kapal, unit pengolahan ikan hingga ke pasar – pasar tradisional yang menjual hasil perikanan serta melakukan kooordinasi antar provinsi karena disinyalir produk yang nengandung formalin bersal dari provinsi tetangga.

4. Optimalisasi patroli pengawasan di laut terhadap usaha penangkapan ikan dengan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Optimalisasi Pokmaswas dalam membantu kegiatan pengawasan pengelolaan SDKP berbasis masyarakat.
6. Membangun sinergi antar Pemerintah Pusat – Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Segera menyusun regulasi di level provinsi terkait Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif.

Permasalahan yang dihadapi adalah jumlah operasi kapal pengawasan terbatas; masih ditemukan penggunaan alat penangkap ikan destruktif dan konflik antar nelayan. Adapun upaya mengatasi dengan mengoptimalkan hari operasi kapal pengawasan yang terbatas dengan menargetkan wilayah rawan pelanggaran; peningkatan operasi penggunaan alat tangkap destruktif dan mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar provinsi perbatasan untuk mengurangi potensi konflik. Manfaat dari program tersebut antara lain terjaganya ekosistem laut, perairan umum daratan, sumber daya ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan, menurunnya pelanggaran peraturan, berkurangnya konflik nelayan serta terbangunnya sinergi dan kerjasama antar provinsi.

3) **Sasaran ketiga** yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, diimplementasikan melalui pencapaian indikator Nilai Kepuasan Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki Target Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2020 sebesar 62, terealisasi sebesar 82,5 dengan capaian kinerja 133,06%. Target Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2021 sebesar 64, terealisasi sebesar 82,5 dengan capaian kinerja 121,32%. Target Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sebesar 80, terealisasi sebesar 84,25 dan mendapatkan capaian kinerja 105,31% serta target Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 81.

4) **Sasaran keempat** yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, diimplementasikan melalui pencapaian indikator Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki target Nilai SAKIP Target Nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 69, terealisasi sebesar 81,3 dengan capaian kinerja 117,56 %. Target Nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 69,5, terealisasi sebesar 81,34 dengan capaian kinerja 117,04%. Target Nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 80, terealisasi sebesar 83,44 dan mendapatkan capaian kinerja 104,30% serta target Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 81.

Capaian Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2020-2023, upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Target kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah serta Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD.

Indikator Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada tahun 2020 sampai 2023 memiliki target 100% dan terealisasi 92,76 pada tahun 2020 dengan capaian 92,76% dan terealisasi 100% pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian 100%.

Indikator Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada tahun 2020 sampai 2023 memiliki target 100% dan dengan Tingkat realisasi 99,30% pada tahun 2020 dengan Tingkat capaian 99,30% dan realisasi 100% pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian 100%.

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Uraian **)	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp.000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Pendapatan						9.900.000	10.683.550	12.768.000	13,950,000	14.025.000	14.579.538	14.444.412	16.717.690	21.016.161.	17.931.810	147.27	135.20	130.93	150.65	127.86	7.74	7.42
Belanja	102.851.000	109.264.500	116.228.000	121.989.000	102.522.285	79.581.156	142.242.398	120.179.610	**118.343.957**	112.793.854	74.597.943	118.176.526	108.286.797	**115.638.783.594**	110.689.157	93.74	83.08	90.10	97,71	98,13	7.30	3.95
Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang meliputi Penerimaan Penjualan Produksi Balai Benih dan Penerimaan Penjualan Produksi Es Batu; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Alat Berat, Sewa Workshop/Bengkel, Sewa Rumah Dinas, Sewa Gedung/Ruang/Aula/Asrama, Sewa Laboratorium, Sewa Lahan, Pas Masuk dan Sewa Tambah Labuh; serta Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan. Capaian Pendapatan Asli Daerah untuk sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 melebihi target yang ditetapkan masing masing sebesar 147,27% pada tahun 2020; 135,20% pada tahun 2021; 130,93% pada tahun 2022; 150,65% pada tahun 2023; 127,86% pada tahun 2024.

- Belanja Daerah

Belanja daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan operasional serta pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2020-2024 berturut-turut sebesar 93,74%; 83,08%; 90,10%; 97,71%; 98,13%. Adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas serta silpa pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus yang tidak dapat dioptimalkan, serta rasionalisasi anggaran menyebabkan rasio Belanja tidak terserap 100, sehingga hal tersebut mempengaruhi capaian kinerja anggaran.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan ketahanan pangan. Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menjadi awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih reliable berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, didasarkan pula pada evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke belakang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Belum optimalnya produksi perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya) dan produksi garam rakyat dikarenakan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta kurang efisiennya sistem distribusi logistik ikan Jawa Tengah.
2. Menurunnya daya dukung lingkungan dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).
3. Masih rendahnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4. Masih tingginya resiko usaha, belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan, serta belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha perikanan dan pergaraman;
5. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan;

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang dimiliki nelayan/kelompok nelayan
			Masih rendahnya kesadaran pengurusan izin perikanan tangkap
			Kondisi overfishing di WPP 712,573 yang menjadi kewenangan provinsi
			Relatif tingginya unreported produksi hasil tangkapan / Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan atau tercatat
			Masih belum optimalnya pengamanan daerah asuhan ikan (jalur 1a atau 0-2 mil) dari alat tangkap aktif bermesin
			Belum terpenuhinya kebutuhan pangan biru dari ikan hasil tangkapan
		Belum optimalnya pelayanan pelabuhan perikanan pantai kewenangan provinsi	Masih terbatasnya sarana prasarana pelabuhan perikanan pantai
			Belum optimalnya penerapan SOP Kepelabuhan perikanan di PPP
			Kurangnya jumlah SDM dan masih rendahnya kompetensi SDM yang ada di PPP
			Masih rendahnya kesadaran nelayan mengurus izin perikanan tangkap, yang menyebabkan nelayan dan kapalnya tidak terlayani oleh pelabuhan perikanan, tidak bisa diterbitkan SLO dan PB, tidak bisa mendapatkan rekomendasi pembelian BBM Subsidi
			Belum optimalnya pelayanan operasional kapal perikanan dan kesyahbandaran pada pelabuhan perikanan kewenangan provinsi, seperti belum adanya sarana radio komunikasi dengan kapal beserta operatornya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya kegiatan patroli dilaut sebagai kontrol kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan yang berlaku
		Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan	Belum optimalnya jaminan perlindungan nelayan (perlindungan jiwa dan usaha)
			Budaya bagi hasil yang tidak proporsional
			Kurangnya akses permodalan sehingga nelayan masih tergantung dengan pengijon
			Kurangnya keterampilan dan kompetensi Nelayan
			Terbatasnya industri pengolahan di kawasan pelabuhan perikanan yang bersinergi dengan proses produksi untuk meningkatkan nilai produk hasil perikanan
			Budaya sosial dan pengelolaan ekonomi masyarakat nelayan yang cenderung konsumtif kondisional
			Tingginya biaya perbekalan terutama Bahan Bakar Minyak sebagai salah satu komponen terbesar dari biaya produksi kegiatan penangkapan ikan
			Sistem pembayaran dari bakul/ perusahaan yang tidak lancer
		Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Terbatasnya ketersediaan kualitas dan kuantitas benih dan induk unggul
			Tingginya biaya produksi , Harga pakan cenderung naik tidak diiringi dengan kenaikan harga jual ikan
			Kurang memadainya sarana dan prasarana perikanan budidaya
			Keterbatasan akses pasar terhadap hasil produksi
			Belum optimalnya perkembangan sentra sentra produksi perikanan budidaya/kawasan/kampung perikanan budidaya
			Belum optimalnya adopsi dan inovasi teknologi adaptif perikanan budidaya
			Menurunnya daya dukung lahan dan perikanan budidaya
			Berkurangnya luasan lahan perikanan budidaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya penerapan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik, Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik
			Terjadinya perubahan iklim yang ekstrim
			Terbatasnya akses permodalan usaha perikanan budidaya
			Terjadinya kematian massal ikan
			Rendahnya pengetahuan dan keterampilan teknis pembudidaya ikan
			Rendahnya kesadaran pembudidaya ikan dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha budidaya ikan
			Belum terpenuhinya kebutuhan pangan biru dari perikanan budidaya
		Masih tingginya Kasus Hama Penyakit Ikan	Menurunya kualitas perairan akibat pencemaran (industry, rumah tangga, akibat perubahan zona peruntukan budidaya)
			Perubahan cuaca yang ekstrim
			Penggunaan benih yang tidak standar/SPF (Specific Pathogen Free)/SPR (Specific Pathogen Resistant)
			Rendahnya pengetahuan terkait dengan hama dan penyakit ikan bagi pembudidaya ikan
			Penggunaan Obat Ikan yang belum terdaftar KKP
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas hasil olahan ikan	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang mutu produk perikanan dan cara pengolahan/penanganan ikan yang baik
			Kurangnya kompetensi pengolah hasil perikanan
			Terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi pengolah hasil perikanan
			kurang optimalnya fungsi jejaring pemasaran antar pelaku usaha
			Kurang optimalnya peta logistik dan rendahnya pemantauan distribusi olahan ikan
			Kurangnya akurasi data unit pengolah ikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya kesadaran UPI dalam menerapkan sistem jaminan mutu
			Rendahnya pemahaman UPI dalam memenuhi persyaratan system jaminan mutu
			Rendahnya minat UPI dalam menerapkan SNI bagi produk perikanan
			Terdapat beberapa produk olahan hasil perikanan yang mengandung bahan kimia berbahaya
			Belum adanya penentuan standar baku dalam penentuan kelas kelompok pelaku usaha perikanan
		Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan	Masih rendahnya kesadaran pemenuhan perizinan berusaha perikanan tangkap
			Masih rendahnya kesadaran pemenuhan perizinan berusaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			Masih rendahnya kesadaran pemenuhan perizinan pemanfaatan ruang laut
			Masih rendahnya kesadaran pemenuhan perizinan berusaha perikanan budidaya
			Masih kecilnya angka penanganan kasus pelanggaran peraturan perundangan kelautan dan perikanan
			Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan
			Masih tingginya kasus konflik antar nelayan
			Masih rendahnya cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan aturan yang berlaku
		Rendahnya produktivitas garam rakyat	Minimnya penerapan dan akses teknologi produksi oleh petambak garam dalam meningkatkan kualitas garam
			Masih belum memadainya saluran irigasi dan jalan produksi tambak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			garam
			Masih terbatasnya kemampuan petambak garam dalam mengakses peningkatan kompetensi
		Masih Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Masih adanya kesenjangan gender pada SDM usaha perikana
			Budaya patriarki yang lebih mendominankan peran laki-laki sebagai pencari nafkah sehingga peran di luar rumah diprioritaskan untuk laki-laki sehingga akses perempuan menjadi rendah untuk ikut berpartisipasi
			Masih rendahnya kualitas SDM masyarakat pesisir dalam pengembangan potensi pesisir
			belum optimalnya kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan
		Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove dan terumbu karang).	Tidak seimbangnya upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut
			Belum tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan terkait RZWP3K yang telah diintegrasikan dengan RTRW
			Belum terkelolanya kawasan konservasi perairan secara efektif, terstruktur dan sistematis
			Masih terbatasnya data potensi kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Tengah yang faktual dan terkini
			Masih terbatasnya pengetahuan pelaku usaha mengenai mekanisme perijinan pemanfaatan ruang laut
			Masih adanya ketidaksesuaian rencana pemanfaatan ruang laut dengan alokasi ruang laut, adanya penyimpangan lokasi usaha dari izin pkprl serta minimnya informasi dampak sosial dan lingkungan
		Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil	Adanya Kerusakan Habitat Mangrove, terumbu karang, dan padang lamun
			Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ekosistem laut dan pesisir
			Adanya dampak perubahan iklim
			Minimnya pengelolaan sampah plastik
			Terjadinya pencemaran laut dan sedimentasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi	Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi
			Kurangnya sarpras pengelolaan kawasan konservasi
			Kurangnya ketersediaan data dan informasi neraca sumber daya laut konservasi
			Kurangnya jumlah SDM pengelola kawasan konservasi yang kompeten
			Belum maksimalnya upaya pengawasan di kawasan konservasi
			Penerapan SOP terkait pengelolaan kawasan konservasi masih kurang maksimal

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan demikian, tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Renstra yaitu "Meningkatkan pertumbuhan PDRB dan kualitas ekosistem kelautan dan perikanan" mempunyai keterkaitan dalam mendukung sasaran daerah yang pertama yaitu : "perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dalam kerangka Jateng Makmur melalui Transformasi Ekonomi.

Pertumbuhan PDRB Subsektor perikanan Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor perikanan yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan sektor perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong pertumbuhan produksi sektor perikanan meliputi produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, industri pengolahan. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (green investment), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (green jobs) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ekonomi biru menjadi strategi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian ekosistem.

Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah, dengan mengacu Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Serta mengacu peruntukan ruang dalam

wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Disamping itu masih rendahnya pertumbuhan ekonomi subsector perikanan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. **Rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir** karena kompetensi dan keterampilan rendah/belum memadai, bagi hasil tidak proporsional, praktik ijon, akses permodalan terbatas, jaminan perlindungan nelayan belum optimal, serta dekat dengan kemiskinan;
2. **Cenderung menurunnya produksi perikanan tangkap** karena *overfishing* di wilayah pengelolaan perikanan, *overcapacity* di Pelabuhan perikanan, *unreported* hasil tangkapan serta minimnya teknologi penangkapan ikan;
3. **Belum optimalnya produksi perikanan budidaya** dikarenakan tingginya harga pakan, rendahnya teknologi, wabah penyakit, menurunnya kualitas benih dan induk, serta kurang memadainya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
4. **Menurunnya daya dukung pesisir** karena abrasi, alih fungsi lahan, perubahan iklim, minimnya pengetahuan stakeholder dalam pengawasan, belum optimalnya pengelolaan ruang laut, serta ketidaksesuaian antara rencana pemanfaatan dengan alokasi ruang laut;
5. **Masih rendahnya produksi dan kualitas garam rakyat** dikarenakan rendahnya kompetensi petambak garam dan teknologi produksinya, serta belum adanya perlindungan terhadap komoditas dan harga garam;
6. **Rendahnya Angka Konsumsi Ikan** dikarenakan rendahnya kompetensi, kurang terkontrolnya jaminan mutu, kurang kesadaran konsumsi ikan masyarakat, serta belum terbentuknya jejaring pemasaran antar pelaku usaha.
7. **Belum optimalnya perlindungan usaha** sehingga masih rendahnya daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
8. **Belum optimalnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan** dikarenakan minimnya upaya pemberantasan dan penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, fasilitas dan sarpras pendukungnya, dan teknologi pengawasan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kelautan dan perikanan di Jawa Tengah memiliki potensi atau tantangan yang akan dihadapi oleh perangkat daerah ke depan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis pada kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah memperhatikan lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang mempengaruhi perangkat daerah langsung maupun tidak langsung. Rumusan isu strategis disajikan dalam table 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya 2. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil 3. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 4. Pengawasan dan penegakan hukum aktivitas perikanan	1. Belum optimalnya pengelolaan produksi perikanan (tangkap, budidaya dan garam), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana; 2. Masih tingginya resiko usaha dan belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan; 3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan	1. Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi masih relatif rendah 3. Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif 4. Belum Optimalnya Tata Kelola	1. Sumber Daya Kelautan 2. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 3. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 4. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 5. Infrastruktur 6. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 7. Gender 8. Pendidikan 9. Kemiskinan	1. Isu Ekonomi : rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan social	1. Ekonomi 2. Sarpras 3. Politik dan Tata Pemerintahan 4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	jaminan keamanan pangan; 4. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).	Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi		3. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas 4. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas		

2.5.1 Peluang Dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan

Dari uraian sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap tantangan dan peluang dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah guna menghasilkan kebijakan dan strategi yang tepat, dengan uraian sebagai berikut :

a. Tantangan

Tantangan (*threat*) adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

(1) Terjadinya penurunan stok sumber daya ikan, khususnya di WPP 723 (Laut Jawa) dikarenakan tingginya tekanan terhadap sumberdaya alam kelautan dan perikanan, terutama pencemaran yang bermuara ke laut dan fenomena *overfishing* serta degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan;

(2) Masih adanya praktik *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* terutama tingginya produksi perikanan yang tidak tercatat/ terlaporkan;

(3) Semakin ketatnya persaingan pasar perikanan dan kelautan serta tuntutan penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan bertolak belakang dengan masih rendahnya daya saing dan tingkat pendapatan pelaku usaha (UKM) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta kurangnya nilai tambah produk pengolahan perikanan di Jawa Tengah;

(4) Keterbatasan bahan baku dan belum meratanya distribusi ikan untuk konsumsi dan pemenuhan bahan baku industri;

(5) Isu kualitas (ISO 9000), isu lingkunan (ISO 14000), isu tenaga kerja, isu *responsible fisheries* dan isu keamanan pangan dan penerapan bea masuk produk perikanan di beberapa negara mengurangi daya saing produk perikanan Indonesia;

(6) Minimnya akses permodalan bagi usaha kelautan dan perikanan;

(7) Tidak seimbangnya luas dan jangkauan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sarana prasarana serta personel pengawas perikanan;

(8) Tingginya harga pakan ikan dan semakin banyaknya dokumen kapal perikanan dikarenakan adanya perubahan regulasi;

(9) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan, seperti infrastuktur pelabuhan, pabrik pakan, gudang garam;

(10) Masih adanya kebijakan lintas instansi/lembaga yang belum sinkron bahkan kontra produktif;
(11) Kemiskinan berkepanjangan secara struktural dan kultural terutama di desa nelayan;
(12) Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan yang belum merata;
(13) Pemanfaatan teknologi infomasi belum optimal dalam mendukung pelayanan, antara lain : pelayanan rekomendasi Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Rekomendasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengolahan, rekomendasi ijin lokasi, rekomendasi ijin pengelolaan perairan pesisir, rekomendasi ijin reklamasi, rekomendasi ijin budidaya ikan, rekomendasi ijin pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

b. Peluang

Peluang (*opportunity*) adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Peluang-peluang (*opportunity*) tersebut antara lain :

(1) Dukungan dan komitmen Pemerintah dalam kebijakan sektor kelautan dan perikanan semakin besar;
(2) Adanya payung hukum perlindungan pelaku usaha kelautan dan Perikanan serta payung hukum penyelenggaraan usaha kelautan dan perikan di Jawa Tengah;
(3) Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung *stakeholders*, termasuk di dalamnya kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan;
(4) Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD.
(5) Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan;
(6) Kelembagaan nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah dan pemasar semakin berkembang;
(7) Kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berbasis Gender semakin meningkat dan bertambah;
(8) Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan bertanggungjawab;
(9) Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan;
(10) Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan;
(11) Pelayanan berbasis teknologi informasi. akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, dan murah.

BAB
III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan Dan Perikanan

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Pelayanan : “Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan” dengan indikator pertumbuhan sub sektor perikanan (persen) dan persentase luasan mangrove yang berkualitas baik (persen).
2. Berkaitan dengan kesekretariatan : “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis” dengan indikator tujuan indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (angka).

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan, dengan indikator sasaran: produksi perikanan (ton/tahun), produksi garam (ton/tahun);
2. Meningkatnya luasan mangrove yang direhabilitasi, dengan indikator sasaran: persentase luasan mangrove yang direhabilitasi;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah, dengan indikator sasaran: indeks manajemen risiko perangkat daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator sasaran: indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan		Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	1,5	1	1	2	2,1	2,2	2,2	2,4	2,4
			Persentase Luasan Mangrove Yang Berkualitas Baik	%	N/A	N/A	66,72	66,88	67,03	67,19	67,34	67,5	67,5
		Meningkatnya luasan mangrove yang direhabilitasi	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%	N/A	0,75	0,79	0,84	0,88	0,92	0,96	1	1
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Ton	940.018	968.353,80	952.717,50	954.029	969.649,90	985.589,40	1.001.857,10	1.018.462,80	4.929.588,2
			Produksi Garam	Ton	595.984,41	629.952,95	539.293,69	541.775,75	544.457,81	547.139,84	549.821,93	552.503,98	2.735.699,31

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	81	82	83	84	85	86	89	90	90
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks manajemen risiko perangkat daerah	Angka	2,63	2,95	3,04	3,13	3,22	3,32	3,42	3,52	3,52
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	Angka	82	83	84	85	86	87	88	89	89

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Strategi yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan produksi tangkap dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
2. Peningkatan produksi garam berkualitas melalui penerapan teknologi dan peningkatan kapasitas petambak garam;
3. Peningkatan produksi budidaya ikan melalui penggunaan benih berkualitas dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan, lingkungan perairan yang kondusif, pembudidaya yang kompeten serta sarana prasarana yang memadai;
4. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor;
5. Peningkatan luasan mangrove melalui rehabilitasi mangrove dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta mengoptimalkan peran stakeholder;
6. Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan atas tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan	1. Meningkatnya produksi perikanan	1.1.1 Peningkatan produksi tangkap dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	1. Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui: a. Pengembangan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan; b. Replacement alat tangkap yang ramah Lingkungan; c. Sosialisasi dan gerai perizinan perikanan tangkap; d. Penenggelaman fish apartment; e. Penyediaan data dan sumber informasi SDI; f. Penggunaan teknologi penangkapan ikan; g. Penerapan cold chain system pada kapal perikanan; h. Penyediaan dokumen pengembangan Kawasan pelabuhan perikanan; i. Penyelenggaraan operasional Pelabuhan dan kesyahbandaran; j. Penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan usaha; k. Pengembangan SPBN; l. Penjaminan kecukupan BBM bagi nelayan melalui rekomendasi pembangunan SPBN; m. Mengoptimalkan pengawasan dan patroli di laut kewenangan provinsi; n. Normalisasi alur pelayaran kapal perikanan.
				2. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui: a. Pembiayaan premi asuransi nelayan;

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				b. Pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil; c. Pengembangan kartu ngopeni nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi terpadu; d. Fasilitasi kurikulum kelautan dan perikanan di Institusi Pendidikan; e. Fasilitasi regenerasi nelayan berupa rekomendasi untuk masuk sekolah dan perguruan tinggi perikanan; f. Sosialisasi dan fasilitasi perjanjian kerja laut (PKL); g. Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha melalui kelembagaan; h. Penguatan kelembagaan kelompok nelayan bertranformasi menjadi koperasi nelayan yang bisa membiayai operasional nelayan; i. Menggandeng lembaga keuangan/perbankan untuk membuka gerai pelayanan di kawasan sentra ekonomi nelayan; j. Pelatihan ketrampilan dan peningkatan kompetensi awak kapal perikanan; k. Fasilitasi BBM Subsidi bagi nelayan kecil; l. Bantuan subsidi bunga Vehicle Monitoring System (VMS); m. Bantuan hibah sarpras penangkapan ikan; n. Pelatihan nelayan milenial o. Bantuan hibah teknologi penangkapan ikan
			1.1.2 Peningkatan	1. Peningkatan produksi perikanan budidaya,

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			produksi budidaya ikan melalui penggunaan benih berkualitas dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan, lingkungan perairan yang kondusif, pembudidaya yang kompeten serta sarana prasarana yang memadai	melalui: a. Pengembangan broodstock center untuk peningkatan kualitas calon induk unggul b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis pembudidayaan ikan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB); c. Penerapan teknologi budidaya yang toleran terhadap perubahan cuaca; d. Fasilitasi perizinan usaha perikanan budidaya (Gerai Perizinan) e. Fasilitasi terkait dengan akses permodalan dan pembiayaan usaha perikanan budidaya; f. Intensifikasi dan penerapan teknologi produksi perikanan budidaya yang adaptif; g. Pengembangan pakan ikan mandiri; h. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya; i. Pengembangan sentra/kawasan/kampung perikanan budidaya, seperti kawasan nila salin, kampung lele, kawasan mina padi dll; j. Peningkatan sarana dan prasarana produksi benih dan calon induk unggul; k. Revitalisasi tambak idle (tambak yang tidak produktif); l. Rehabilitasi sarana prasarana unit perbenihan UPTD; m. Bantuan calon induk untuk Unit

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				Perbenihan Rakyat (UPR); n. Subsidi pakan ikan untuk pembudidaya ikan.
				2. Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan Melalui : a. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis pembudidayaan ikan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB); b. Fasilitasi perizinan usaha perikanan budidaya (Gerai Perizinan); c. Fasilitasi terkait dengan akses permodalan dan pembiayaan usaha perikanan budidaya; d. Pelatihan budidaya untuk pembudidaya milenial;
				3. Pengendalian sebaran hama penyakit ikan melalui a. Fasilitasi monitoring kualitas lingkungan budidaya; b. Penyebarluasan informasi terkait dengan perubahan iklim; c. Fasilitasi pengujian kesehatan dan hama penyakit ikan; d. Fasilitasi penyebarluasan informasi terkait dengan hama dan penyakit ikan; e. Fasilitasi pendataan dan pembinaan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				peredaran Obat Ikan.
				4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan, melalui: a. Meningkatkan angka penanganan kasus pelanggaran peraturann perundangan kelautan dan perikanan. b. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan. d. Meningkatkan sinergitas stakeholder kelautan dan perikanan dalam antisipasi konflik antar nelayan. e. Meningkatkan cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP.
			1.1.3 Peningkatan produksi garam berkualitas melalui penerapan teknologi dan peningkatan kapasitas petambak garam	1. Peningkatan produksi usaha garam rakyat melalui: a. Pembangunan dan revitalisasi prasarana usaha pergaraman b. Pemberian bantuan sarana produksi c. Peningkatan kompetensi SDM petambak garam d. Peningkatan luasan tambak garam yang

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				menerapkan teknologi e. Penyusunan data potensi garam rakyat Jawa Tengah
				2. Pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir melalui: a. Sosialisasi dan pelatihan teknologi tepat guna serta pelatihan manajemen usaha mulai dari pra produksi hingga paska produksi dan pemasaran; b. Pemberian bantuan sarana prasarana usaha;
			1.1.4 Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor	1. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui : a. pemenuhan kebutuhan bahan baku; b. peningkatan konsumsi ikan; c. peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, sanitasi dan higien; d. Peningkatan kompetensi pengolah hasil perikanan; e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi teknologi pengolah hasil perikanan; f. Verifikasi perizinan usaha pengolah dan pemasar perikanan; g. Promosi dan pemasaran produk perikanan termasuk Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) h. Pelatihan Pengolahan Ikan (GMP/SSOP/Diversifikasi Olahan Ikan); i. Pembangunan fish market (dengan BUMD

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				sebagai leading sektor) j. Mengoptimalkan pengawasan distribusi kesesuaian peruntukan bahan baku ikan olahan dan hasil olahan ikan; k. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk olahan ikan; l. Diversifikasi produk perikanan; m. fasilitasi kemitraan pemasaran antara pelaku usaha; n. Penguatan kerjasama tata kelola logistic; o. Perluasan ke akses pasar institusi.
			1.1.5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	1. Peningkatan peran serta dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui : a. Meningkatkan angka penanganan kasus pelanggaran peraturann perundangan kelautan dan perikanan; b. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan; c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan; d. Meningkatkan sinergitas stakeholder kelautan dan perikanan dalam antisipasi konflik antar nelayan;

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				e. Meningkatkan cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP; f. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Pengawasan Pokmaswas di Perairan Umum Daratan; g. Bantuan Sarana dan Prasarana Pokmaswas; h. Hibah Pemberdayaan Masyarakat melalui Bagan Kekerangan yang berfungsi sebagai Pos Pengawasan Pokmaswas; i. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Pengawasan Pokmaswas di Perairan Umum Daratan; j. Bantuan Sarana dan Prasarana Perahu Pokmaswas di Perairan Daratan. k. Peralatan Pengelolaan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir dan Payau
		2. Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	1.2.1 Peningkatan luasan mangrove melalui rehabilitasi mangrove dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta mengoptimalkan peran stakeholder	1. Pengelolaan dan peningkatan sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui b. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan konservasi; c. Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi; d. Pemutakhiran data potensi kelautan, pesisir dan pulau" kecil Jawa Tengah; e. Rehabilitasi ekosistem mangrove dan penenggelaman terumbu karang buatan; f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait RZWP3K yang telah terintegrasi dengan RTRW ;

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				g. Sosialisasi pengelolaan Kawasan konservasi kepada stake holder terkait; h. Monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang laut; i. Verifikasi teknis terkait rencana pengajuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut; j. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, pengamanan daerah asuhan ikan (jalur Ia atau 0-2 mil dari alat tangkap aktif bermesin dan peningkatan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon; k. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi eksosistem vital di laut dan pesisir; l. Pemanfaatan teknologi digital dengan pengembangan sistem aplikasi yang mencakup update informasi terkait sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.
3	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daearah berintegritas dan dinamis		1.3.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan	1. Peningkatan kualitas pelayanan perangkat melalui : a. Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN; b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik; c. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik;

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Perikanan	d. Peningkatan pengelolaan informasi yang kompetitif; e. Peningkatan pengelolaan data dan informasi melalui manajemen yang baik; f. Penguatan tim dalam rangka mendukung tingkat organisasi maupun pelayanan public; g. Rehabilitasi sarana prasarana pelayanan.
			1.3.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Peningkatan kualitas pengeloan risiko perangkat daerah : a. Penguatan komitmen dalam meningkatkan nilai-nilai kedisiplinan mengenai hak dan kewajiban PNS; b. Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN; c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik; d. Penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT; e. Penguatan pengawasan dan pengendalian sesuai tujuan dan risiko.

Selain itu, disajikan pentahapan pembangunan yang dimaksudkan untuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Prioritas dalam setiap tahapan harus mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan sebelumnya. Pentahapan dimaksud disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan produktivitas serta daya saing produksi perikanan, melalui : - Rehabilitasi Sarpras Pelabuhan Perikanan - Peninggian kawasan pelabuhan - Pemenuhan dokumen pendukung Pelabuhan perikanan - Asuransi nelayan - Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan dan pergaraman melalui pelatihan - Penyediaan benih ikan berkualitas melalui rehabilitasi sarpras UPTD perbenihan - Revitalisasi tambak nila salin - Pelatihan diversifikasi	Peningkatan peran sub sektor perikanan dalam PDRB Jawa Tengah, melalui : - Rehabilitasi Sarpras Pelabuhan Perikanan - Asuransi nelayan - Penguatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan dan pergaraman melalui pelatihan - Pembinaan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) - Modernisasi sarpras pelaku usaha perikanan dan pergaraman - Revitalisasi tambak nila salin - Bantuan benih untuk UPR - Pelatihan diversifikasi usaha	Peningkatan dan pemerataan ekonomi berbasis optimalisasi potensi sektor kelautan perikanan, melalui : - Rehabilitasi Sarpras Pelabuhan Perikanan - Asuransi nelayan - Peningkatan kelembagaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman - Pembinaan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) - Modernisasi sarpras pelaku usaha perikanan dan pergaraman - Pengembangan pakan mandiri - Pelatihan diversifikasi usaha dan manajemen keuangan Perempuan pesisir - Kampanye GEMARIKAN	Menumbuhkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan, melalui : - Rehabilitasi sarpras pelabuhan perikanan - Asuransi nelayan - Fasilitasi akses permodalan pelaku usaha perikanan dan pergaraman - Pengembangan kawasan Budidaya ikan berbasis kearifan lokal (kelanjutan nila salin) - Pengembangan pakan mandiri - Fasilitasi Kegiatan Hasil Penerapan Teknologi Lahan Garam - Pelatihan diversifikasi usaha dan manajemen keuangan Perempuan	Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan melalui : - Rehabilitasi sarpras pelabuhan perikanan - Digitalisasi sistem tata kelola pelabuhan perikanan - Kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan untuk membuka gerai pelayanan di kawasan sentra ekonomi nelayan; - Memperluas jejaring pemasaran produk kelautan perikanan agar semakin maju dan berkelanjutan - Kampanye GEMARIKAN - Ekstensifikasi pembudidayaan ikan berkelanjutan - Meningkatkan ketangguhan pengawasan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
usaha pengolahan ikan dan manajemen keuangan Perempuan pesisir - Kampanye GEMARIKAN - *Piloting project underwater restocking* - Rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove) - Kajian dokumen untuk usulan penetapan kawasan konservasi - Bantuan Vehicle Monitoring System (VMS) Kapal Perikanan	pengolahan ikan dan manajemen keuangan Perempuan pesisir - Kampanye GEMARIKAN - Rehabilitasi mangrove (Mageri Segoro) - Kajian dokumen untuk usulan penetapan kawasan konservasi - Kelanjutan *project underwater restocking* - Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan - Hibah kelompok Masyarakat pengawas	- Rehabilitasi mangrove (Mageri Segoro) - Kajian dokumen untuk usulan penetapan kawasan konservasi - Bantuan Sarana dan Prasarana Perahu Pokmaswas di Perairan Daratan - Perluasan lahan garam yang berteknologi untuk pemenuhan kebutuhan industri di Jawa Tengah - Kelanjutan *project underwater restocking*	pesisir - Pengembangan Jejaring pemasaran pengolah dan pemasar produk perikanan - Kampanye GEMARIKAN - Rehabilitasi ekosistem mangrove (Mageri Segoro) - Kelanjutan *project underwater restocking* - Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Pengawasan Pokmaswas di Perairan Umum Daratan	SDKP - Meningkatkan pelayanan melalui rehabilitasi sarana prasaran penunjang gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Replikasi pengembangan kawasan konservasi berbasis eco wisata berkelanjutan - Kelanjutan *project underwater restocking* - Pembangunan pabrik pengolahan garam (konvergensi dengan SPJT)

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2025- 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan	Kematian ikan	12	Adanya hama dan penyakit ikan	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Monitoring hama dan penyakit ikan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
		Benih ikan tidak tumbuh berkembang	12	Benih ikan tidak bermutu.	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Sertifikasi dan pembinaan perbenihan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
		Nelayan tidak melaut	12	cuaca buruk dan tingginya biaya operasional melaut	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Hibah/bantuan kepada nelayan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
		Nelayan melaut semakin jauh	12	Menurunnya Sumber Daya Ikan di laut	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Pembuatan Terumbu Karang Buatan dan pengawasan penggunaan alat tangkap	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam	Petambak garam tidak dapat berproduksi	16	Tingginya curah hujan	Volume produksi garam turun	Penggunaan teknologi geo membran dan tunnel dalam produksi garam	Kepala OPD	Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Petambak garam tidak dapat berproduksi	16	Proses produksi masih tradisional	Volume produksi garam turun	Bantuan/hibah peralatan produksi garam kepada petambak garam	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
Meningkatnya Luasan Mangrove Yang Direhabilitasi	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Matinya bibit mangrove yang ditanam	12	Lokasi dan jenis tanah tidak sesuai	Ekosistem pesisir rusak	Jenis mangrove sesuai dengan jenis tanah	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelayanan lambat	9	Personil OPD tidak memahami tugasnya	Kebutuhan masyarakat tidak terlayani	Rapat evaluasi dan pengendalian kegiatan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
		Pelayanan lambat	9	Personil OPD tidak berorientasi pelayanan	Kebutuhan masyarakat tidak terlayani	Sosialisasi dan kanal aduan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029

BAB
IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian Tujuan dan Sasaran serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada satu urusan pilihan (kelautan dan perikanan).

Dalam perkembangan periode waktu 5 (lima) tahun, upaya mewujudkan kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan dan mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, program dimaksud adalah :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut meliputi :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri dari :
   a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
   b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
   c. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

d. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Asemdoyong
e. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Bajomulyo
f. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Irovinsi PPP Karimunjawa
g. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Klidanglor
h. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Larangan
i. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Lohgending
j. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Morodemak
k. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Tasikagung
l. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Tawang
m. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Tegalsari
n. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi PPP Wonokerto

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari :
   a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
   b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
   c. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut pada Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
   d. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat pada Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
   e. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut pada Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A

3. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
   a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
   b. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
   c. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
   d. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur
   e. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan

4. Program Pengawasan Sumberdaya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
b. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
c. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
d. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur
e. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
   a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
   b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
   c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
   d. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar pada Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
   e. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   h. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan serta pendanaan tahun ke-1 s.d tahun ke-5 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (PE) *								75.361.404.500		28.852.096.500		28.861.404.500		29.818.046.500		31.961.404.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan *	%	1,0	2,0		2,1		2,2		2,2		2,4		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Perikanan **							75.361.404.500		28.852.096.500		28.861.404.500		29.818.046.500		31.961.404.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Produksi Perikanan **	Ton	968.354	954.029	74.515.115.500	969.650	28.005.807.500	985.589	28.015.115.500	1.001.857	28.971.757.500	1.018.463	30.915.115.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ***						521.071.000		521.071.000		521.071.000		521.071.000		621.071.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			Meningkatnya Dokumen IKRL (Informasi Kesesuaian Ruang Laut) yang Diterbitkan	Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan ***	%	N/A	25	521.071.000	40	521.071.000	54	521.071.000	68	521.071.000	82	621.071.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ****						521.071.000		521.071.000		521.071.000		521.071.000		621.071.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			Meningkatnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan Oleh SK Menteri	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan ****	Lokasi	1	1	302.798.000	1	302.798.000	1	302.798.000	1	302.798.000	1	402.798.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat *****						302.798.000		302.798.000		302.798.000		302.798.000		402.798.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola *****	Ha	244,88	750,03	302.798.000	299,86	302.798.000	2.245,99	302.798.000	1.176,31	302.798.000	1.083,89	402.798.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil JAWA TENGAH
			Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan Sesuai Ketentuan RTRWP	Jumlah wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang dimanfaatkan sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ****	Lokasi	5	5	218.273.000	5	218.273.000	5	218.273.000	5	218.273.000	5	218.273.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir *****						218.273.000		218.273.000		218.273.000		218.273.000		218.273.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP *****	Dokumen	1	4	218.273.000	4	218.273.000	4	218.273.000	3	218.273.000	2	218.273.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						26.684.586.000		4.084.586.000		4.084.586.000		4.084.586.000		4.384.586.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap ***	Ton	410.642	354.029	26.684.586.000	364.650	4.084.586.000	375.589	4.084.586.000	386.857	4.084.586.000	398.463	4.384.586.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil ****						25.773.748.000		3.173.748.000		3.173.748.000		3.173.748.000		3.373.748.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya nelayan yang mendapatkan asuransi, Bantuan Operasional Penangkapan Ikan, Fasilitasi Kelembagaan serta Perlindungan dan Pemberdayaan Lainnya	Jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan ****	Orang	10.000	10.000	24.733.380.000	10.000	2.233.380.000	10.000	2.233.380.000	10.000	2.233.380.000	10.000	2.233.380.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap *****						24.733.380.000		2.233.380.000		2.233.380.000		2.233.380.000		2.233.380.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil *****	Unit	N/A	2	24.733.380.000	2	2.233.380.000	2	2.233.380.000	2	2.233.380.000	2	2.233.380.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap
			Meningkatnya nelayan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi seperti: Sertifikat Kelayakan Nelayan (SKN), cara penanganan ikan yang baik di atas kapal (CPIB), Basic Safety Training Fisheries (BSTF), Ahli nautika kapal perikanan Tingkat 3 (Ankapin 3), Ahli Teknika kapal perikanan tingkat 3 (Atkapin 3) dll	Jumlah nelayan ditingkatkan kompetensinya ****	Orang	30	30	890.368.000	30	790.368.000	30	790.368.000	30	790.368.000	30	990.368.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap *****						890.368.000		790.368.000		790.368.000		790.368.000		990.368.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil *****	Unit	50	30	890.368.000	30	790.368.000	30	790.368.000	30	790.368.000	30	990.368.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap JAWA TENGAH
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Perikanan Tangkap yang dikumpulkan dan diperiksa ****	Data	53	53	150.000.000	53	150.000.000	53	150.000.000	53	150.000.000	53	150.000.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan *****						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	
			Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil *****	Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT ****						560.838.000		560.838.000		560.838.000		560.838.000		660.838.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Kapal Yang Menerapkan Dokumen Kapal Perikanan	Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan ****	Unit	1.072	1.000	560.838.000	1.000	560.838.000	1.000	560.838.000	1.000	560.838.000	1.000	660.838.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil *****						560.838.000		560.838.000		560.838.000		560.838.000		660.838.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	
			Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil *****	%	100	100	560.838.000	100	560.838.000	100	560.838.000	100	560.838.000	100	660.838.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan dan/ atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan Meliputi Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah, Penetapan Kelas Pelabuhan dan Personil Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen (PPPD) Pelabuhan Perikanan serta dokumen lain yang bersifat global	Jumlah Dokumen Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan yang disusun ****	Dokumen	1	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
		Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan *****						350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan *****	Pelabuhan Perikanan	11	11	350.000.000	11	350.000.000	11	350.000.000	11	350.000.000	11	350.000.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	Bidang Perikanan Tangkap JAWA TENGAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						788.189.000		788.189.000		788.189.000		788.189.000		788.189.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Asemdoyong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong ***	%	73	100	788.189.000	100	788.189.000	100	788.189.000	100	788.189.000	100	788.189.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						788.189.000		788.189.000		788.189.000		788.189.000		788.189.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi ****	Unit	1	1	83.840.000	1	83.840.000	1	83.840.000	1	83.840.000	1	83.840.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						83.840.000		83.840.000		83.840.000		83.840.000		83.840.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	27	27	83.840.000	27	83.840.000	27	83.840.000	27	83.840.000	27	83.840.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B PEMALANG
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	224	1.660	704.349.000	1.700	704.349.000	1.720	704.349.000	1.750	704.349.000	1.780	704.349.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						704.349.000		704.349.000		704.349.000		704.349.000		704.349.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	10	10	704.349.000	10	704.349.000	10	704.349.000	10	704.349.000	10	704.349.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B PEMALANG
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						838.323.000		838.323.000		838.323.000		838.323.000		838.323.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto ***	%	100	100	838.323.000	100	838.323.000	100	838.323.000	100	838.323.000	100	838.323.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						838.323.000		838.323.000		838.323.000		838.323.000		838.323.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi ****	Unit	3	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	23	23	200.000.000	23	200.000.000	23	200.000.000	23	200.000.000	23	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	1.278	1.050	638.323.000	1.050	638.323.000	1.050	638.323.000	1.050	638.323.000	1.050	638.323.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						638.323.000		638.323.000		638.323.000		638.323.000		638.323.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	11	11	638.323.000	11	638.323.000	11	638.323.000	11	638.323.000	11	638.323.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN PEKALONGAN Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						881.261.000		881.261.000		881.261.000		881.261.000		881.261.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan PPP Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor ***	%	70	100	881.261.000	100	881.261.000	100	881.261.000	100	881.261.000	100	881.261.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						881.261.000		881.261.000		881.261.000		881.261.000		881.261.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi ****	Unit	4	1	453.600.000	1	453.600.000	1	453.600.000	1	453.600.000	1	453.600.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						453.600.000		453.600.000		453.600.000		453.600.000		453.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	19	19	453.600.000	19	453.600.000	19	453.600.000	19	453.600.000	19	453.600.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	BATANG Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	5.020	4.050	427.661.000	4.100	427.661.000	4.150	427.661.000	4.200	427.661.000	4.250	427.661.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						427.661.000		427.661.000		427.661.000		427.661.000		427.661.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	15	15	427.661.000	15	427.661.000	15	427.661.000	15	427.661.000	15	427.661.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	BATANG Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						928.813.000		928.813.000		928.813.000		928.813.000		928.813.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang ***	%	100	100	928.813.000	100	928.813.000	100	928.813.000	100	928.813.000	100	928.813.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						928.813.000		928.813.000		928.813.000		928.813.000		928.813.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi ****	kg/kapita/tahun	3	1	436.524.000	1	436.524.000	1	436.524.000	1	436.524.000	1	436.524.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						436.524.000		436.524.000		436.524.000		436.524.000		436.524.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	17	17	436.524.000	17	436.524.000	17	436.524.000	17	436.524.000	17	436.524.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	226	50	492.289.000	60	492.289.000	70	492.289.000	80	492.289.000	90	492.289.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						492.289.000		492.289.000		492.289.000		492.289.000		492.289.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	13	17	492.289.000	17	492.289.000	17	492.289.000	17	492.289.000	17	492.289.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						8.718.117.000		1.208.809.000		1.218.117.000		1.218.117.000		1.218.117.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Morodemak Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak ***	%	81	91	8.718.117.000	100	1.208.809.000	100	1.218.117.000	100	1.218.117.000	100	1.218.117.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						8.718.117.000		1.208.809.000		1.218.117.000		1.218.117.000		1.218.117.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi ****	Unit	2	1	816.765.000	1	807.457.000	1	816.765.000	1	816.765.000	1	816.765.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						816.765.000		807.457.000		816.765.000		816.765.000		816.765.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	18	19	816.765.000	20	807.457.000	21	816.765.000	21	816.765.000	21	816.765.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	DEMAK Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	493	4.500	7.901.352.000	5.000	401.352.000	5.500	401.352.000	6.000	401.352.000	6.500	401.352.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						7.901.352.000		401.352.000		401.352.000		401.352.000		401.352.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	10	12	7.901.352.000	12	401.352.000	12	401.352.000	12	401.352.000	12	401.352.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	DEMAK Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						837.122.000		537.122.000		537.122.000		537.122.000		837.122.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Karimunjawa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa ***	%	91	100	837.122.000	100	537.122.000	100	537.122.000	100	537.122.000	100	837.122.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						837.122.000		537.122.000		537.122.000		537.122.000		837.122.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	505	930	390.092.000	950	90.092.000	970	90.092.000	990	90.092.000	1.000	390.092.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						390.092.000		90.092.000		90.092.000		90.092.000		390.092.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	10	15	390.092.000	15	90.092.000	15	90.092.000	15	90.092.000	15	390.092.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi ****	Unit	2	2	447.030.000	2	447.030.000	2	447.030.000	2	447.030.000	2	447.030.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						447.030.000		447.030.000		447.030.000		447.030.000		447.030.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	23	23	447.030.000	23	447.030.000	23	447.030.000	23	447.030.000	23	447.030.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						691.613.000		691.613.000		691.613.000		691.613.000		691.613.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan ***	%	72	100	691.613.000	100	691.613.000	100	691.613.000	100	691.613.000	100	691.613.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						691.613.000		691.613.000		691.613.000		691.613.000		691.613.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	1.115	150	541.928.000	160	541.928.000	170	541.928.000	180	541.928.000	190	541.928.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						541.928.000		541.928.000		541.928.000		541.928.000		541.928.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	8	14	541.928.000	14	541.928.000	14	541.928.000	14	541.928.000	14	541.928.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B TEGAL
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi ****	Unit	1	1	149.685.000	1	149.685.000	1	149.685.000	1	149.685.000	1	149.685.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						149.685.000		149.685.000		149.685.000		149.685.000		149.685.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	14	14	149.685.000	14	149.685.000	14	149.685.000	14	149.685.000	14	149.685.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B TEGAL
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						1.199.130.000		1.199.130.000		1.199.130.000		1.199.130.000		1.199.130.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Tegalsari Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari ***	%	72	100	1.199.130.000	100	1.199.130.000	100	1.199.130.000	100	1.199.130.000	100	1.199.130.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						1.199.130.000		1.199.130.000		1.199.130.000		1.199.130.000		1.199.130.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	3.533	9.725	281.490.000	9.725	281.490.000	9.725	281.490.000	9.725	281.490.000	9.725	281.490.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						281.490.000		281.490.000		281.490.000		281.490.000		281.490.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	16	20	281.490.000	20	281.490.000	20	281.490.000	20	281.490.000	20	281.490.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	KOTA TEGAL
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi ****	Unit	1	1	917.640.000	1	917.640.000	1	917.640.000	1	917.640.000	1	917.640.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						917.640.000		917.640.000		917.640.000		917.640.000		917.640.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	26	26	917.640.000	26	917.640.000	26	917.640.000	26	917.640.000	26	917.640.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	KOTA TEGAL
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						1.307.791.000		1.107.791.000		1.107.791.000		1.107.791.000		1.307.791.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana ***	%	100	100	1.307.791.000	100	1.107.791.000	100	1.107.791.000	100	1.107.791.000	100	1.307.791.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						1.307.791.000		1.107.791.000		1.107.791.000		1.107.791.000		1.307.791.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi ****	Unit	N/A	1	672.517.000	1	672.517.000	1	672.517.000	1	672.517.000	1	672.517.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						672.517.000		672.517.000		672.517.000		672.517.000		672.517.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	29	29	672.517.000	29	672.517.000	29	672.517.000	29	672.517.000	29	672.517.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	JAWA TENGAH PATI
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	3.272	6.600	635.274.000	6.600	435.274.000	6.600	435.274.000	6.600	435.274.000	6.600	635.274.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						635.274.000		435.274.000		435.274.000		435.274.000		635.274.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	16	15	635.274.000	15	435.274.000	15	435.274.000	15	435.274.000	15	635.274.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	JAWA TENGAH PATI
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						1.335.766.000		1.035.766.000		1.035.766.000		1.035.766.000		1.335.766.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung ***	%	100	100	1.335.766.000	100	1.035.766.000	100	1.035.766.000	100	1.035.766.000	100	1.335.766.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						1.335.766.000		1.035.766.000		1.035.766.000		1.035.766.000		1.335.766.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,UKL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,)/Dokumen ISO/WBK/KKPRL/KKPR/Studi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat Tanah ****	Unit	1	1	153.390.000	1	153.390.000	1	153.390.000	1	153.390.000	1	153.390.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						153.390.000		153.390.000		153.390.000		153.390.000		153.390.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	12	12	153.390.000	12	153.390.000	12	153.390.000	12	153.390.000	12	153.390.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A REMBANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	7.189	9.700	1.182.376.000	9.720	882.376.000	9.750	882.376.000	9.775	882.376.000	9.800	1.182.376.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						1.182.376.000		882.376.000		882.376.000		882.376.000		1.182.376.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	11	15	1.182.376.000	15	882.376.000	15	882.376.000	15	882.376.000	15	1.182.376.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	PPN Tasikagung Kelas A, JAWA TENGAH REMBANG
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP ***						1.080.716.500		1.080.716.500		1.080.716.500		1.080.716.500		1.080.716.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Lohgending Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending ***	%	63	100	1.080.716.500	100	1.080.716.500	100	1.080.716.500	100	1.080.716.500	100	1.080.716.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ****						1.080.716.500		1.080.716.500		1.080.716.500		1.080.716.500		1.080.716.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Meningkatnya Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi ****	Unit	N/A	1	433.289.500	1	433.289.500	1	433.289.500	1	433.289.500	1	433.289.500	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan *****						433.289.500		433.289.500		433.289.500		433.289.500		433.289.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia *****	Unit	25	25	433.289.500	25	433.289.500	25	433.289.500	25	433.289.500	25	433.289.500	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	DESA AYAH, AYAH, KEBUMEN
			Meningkatnya Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan ****	Dokumen	54	52	647.427.000	63	647.427.000	65	647.427.000	70	647.427.000	75	647.427.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan *****						647.427.000		647.427.000		647.427.000		647.427.000		647.427.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana *****	Layanan	16	16	647.427.000	16	647.427.000	16	647.427.000	16	647.427.000	17	647.427.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	KEBUMEN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA ***						1.964.220.000		1.664.220.000		1.664.220.000		1.664.220.000		1.964.220.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya ***	Ton	554.810	600.000	1.964.220.000	605.000	1.664.220.000	610.000	1.664.220.000	615.000	1.664.220.000	620.000	1.964.220.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut ****						683.220.000		683.220.000		683.220.000		683.220.000		683.220.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Pembinaan yang dilaksanakan kepada pembudidaya ikan (CBIB, CPIB, CPPIB, Kelembagaan, Bimtek ,akses Permodalan dll)	Jenis Pembinaan Yang Dilaksanakan ****	Jenis	3	3	339.220.000	3	339.220.000	3	339.220.000	3	339.220.000	3	339.220.000	Pokja Pengembangan Komoditas	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi *****						339.220.000		339.220.000		339.220.000		339.220.000		339.220.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya *****	Orang	40	30	339.220.000	30	339.220.000	30	339.220.000	30	339.220.000	30	339.220.000	Pokja Pengembangan Komoditas	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Pembudidaya Ikan yang Menerima Sarpras Perikanan Budidaya yang Meliputi Keramba Jaring Apung / Benih/ Pakan/dll	Jumlah Pembudidaya ikan yang difasilitasi sarana dan prasarana ****	Orang	N/A	10	344.000.000	10	344.000.000	10	344.000.000	10	344.000.000	10	344.000.000	Pokja Pengembangan Komoditas	
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						154.000.000		154.000.000		154.000.000		154.000.000		154.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Dokumen	1	1	154.000.000	1	154.000.000	1	154.000.000	1	154.000.000	1	154.000.000	Pokja Pengembangan Komoditas	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas JAWA TENGAH
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut *****						190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut *****	Unit	N/A	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	Pokja Pengembangan Komoditas	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas JAWA TENGAH
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat ****						1.281.000.000		981.000.000		981.000.000		981.000.000		1.281.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Meningkatnya Teknologi yang Diterapkan Oleh Pembudidaya Ikan Meliputi Kolam Bundar, Nila Salin, Minapadi, Mesin Pakan Ikan	Jenis teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya ****	Jenis	2	3	1.281.000.000	3	981.000.000	3	981.000.000	3	981.000.000	3	1.281.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						1.281.000.000		981.000.000		981.000.000		981.000.000		1.281.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Unit	19	10	1.281.000.000	10	981.000.000	10	981.000.000	10	981.000.000	10	1.281.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas JAWA TENGAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA ***						863.640.000		863.640.000		863.640.000		863.640.000		863.640.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Meningkatnya Penanganan Hama, Penyakit Ikan dan lingkungan	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan ***	%	100	100	863.640.000	100	863.640.000	100	863.640.000	100	863.640.000	100	863.640.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut ****						863.640.000		863.640.000		863.640.000		863.640.000		863.640.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Sampel Yang Diujikan Di Tiga (3) Laboratorium Yaitu Laboratorium Biologi, Laboratorium Biomolekuler dan Laboratorium Kualitas Air	Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium ****	sampel	446	450	471.089.000	500	471.089.000	550	471.089.000	600	471.089.000	650	471.089.000	Pokja Pengelolaan Kesehatan Ikan	
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						471.089.000		471.089.000		471.089.000		471.089.000		471.089.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia *****	Unit	3	3	471.089.000	3	471.089.000	3	471.089.000	3	471.089.000	3	471.089.000	Pokja Pengelolaan Kesehatan Ikan	JAWA TENGAH
			Meningkatnya Unit Pembudidaya Ikan Yang Tertangani Terkait Kesehatan Ikan dan Lingkungannya	Jumlah unit pembudidaya ikan yang tertangani terkait kesehatan ikan dan lingkungannya ****	Unit	35	40	392.551.000	45	392.551.000	50	392.551.000	55	392.551.000	60	392.551.000	Pokja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						392.551.000		392.551.000		392.551.000		392.551.000		392.551.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Dokumen	35	35	392.551.000	35	392.551.000	35	392.551.000	35	392.551.000	35	392.551.000	Pokja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan	JAWA TENGAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA ***						20.634.743.000		5.634.743.000		5.634.743.000		6.591.385.000		6.634.743.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Meningkatnya Produksi Ikan Konsumsi	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut ***	%	5	5	20.634.743.000	5	5.634.743.000	5	5.634.743.000	5	6.591.385.000	5	6.634.743.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut ****						650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		1.150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Meningkatnya Loka Air Laut yang Direhabilitasi Sarana dan Prasaranya	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya ****	Lokasi	1	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	1.150.000.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut *****						250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut *****	Unit	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut *****						400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut *****	Unit	1	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	900.000.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	JAWA TENGAH
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat ****						19.984.743.000		4.984.743.000		4.984.743.000		5.941.385.000		5.484.743.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Meningkatnya Ikan Endemik Lokal yang Dikembangkan	Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan ****	Jenis	1	1	4.984.743.000	1	4.484.743.000	1	4.484.743.000	1	4.484.743.000	1	4.984.743.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						4.984.743.000		4.484.743.000		4.484.743.000		4.484.743.000		4.984.743.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Unit	27	27	4.984.743.000	27	4.484.743.000	27	4.484.743.000	27	4.484.743.000	27	4.984.743.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	JAWA TENGAH
			Meningkatnya Loka Air Tawar dan Payau Yang Direhabilitasi Sarana dan Prasarananya	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya ****	Lokasi	9	9	15.000.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	9	1.456.642.000	9	500.000.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						15.000.000.000		500.000.000		500.000.000		1.456.642.000		500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Unit	5	5	15.000.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	1.456.642.000	5	500.000.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	JAWA TENGAH
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN ***						642.909.000		642.909.000		642.909.000		642.909.000		642.909.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan ***	%	N/A	50	342.909.000	50	342.909.000	52	342.909.000	55	342.909.000	55	342.909.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ****						342.909.000		342.909.000		342.909.000		342.909.000		342.909.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya tindaklanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan Kelautan sampai dengan 12 mil ****	%	80	80	236.985.000	80	236.985.000	85	236.985.000	90	236.985.000	90	236.985.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi *****						58.300.000		58.300.000		58.300.000		58.300.000		58.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani *****	Perkara	N/A	3	58.300.000	3	58.300.000	4	58.300.000	4	58.300.000	5	58.300.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi *****						66.460.000		66.460.000		66.460.000		66.460.000		66.460.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	15	3	66.460.000	3	66.460.000	5	66.460.000	5	66.460.000	5	66.460	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) *****						112.225.000		112.225.000		112.225.000		112.225.000		112.225.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan *****	Kelompok Masyarakat	N/A	3	112.225.000	4	112.225.000	4	112.225.000	5	112.225.000	6	112.225.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
			Meningkatnya HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan ****	Dokumen	N/A	10	105.924.000	15	105.924.000	15	105.924.000	20	105.924.000	25	105.924.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi *****						105.924.000		105.924.000		105.924.000		105.924.000		105.924.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	30	20	105.924.000	24	105.924.000	24	105.924.000	30	105.924.000	30	105.924.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan ***	%	N/A	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ****						300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan ****	%	80	50	300.000.000	50	300.000.000	52	300.000.000	52	300.000.000	52	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan *****						300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan *****	Hari Operasi	8	10	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	14	300.000.000	14	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN ***						819.093.000		819.093.000		819.093.000		819.093.000		819.093.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di WIlayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur ***	%	N/A	61	494.056.000	61	494.056.000	61	494.056.000	61	494.056.000	61	494.056.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ****						494.056.000		494.056.000		494.056.000		494.056.000		494.056.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Meningkatnya Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan ****	%	N/A	50	494.056.000	50	494.056.000	48	494.056.000	48	494.056.000	48	494.056.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan *****						494.056.000		494.056.000		494.056.000		494.056.000		494.056.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan *****	Hari Operasi	10	10	494.056.000	12	494.056.000	12	494.056.000	15	494.056.000	15	494.056.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur ***	%	N/A	17	325.037.000	19	325.037.000	21	325.037.000	23	325.037.000	25	325.037.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ****						325.037.000		325.037.000		325.037.000		325.037.000		325.037.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Meningkatnya tindaklanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil ****	%	100	100	258.066.000	100	258.066.000	100	258.066.000	100	258.066.000	100	258.066.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi *****						56.984.000		56.984.000		56.984.000		56.984.000		56.984.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani *****	Perkara	N/A	5	56.984.000	5	56.984.000	5	56.984.000	7	56.984.000	7	56.984.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi *****						61.268.000		61.268.000		61.268.000		61.268.000		61.268.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	50	24	61.268.000	24	61.268.000	30	61.268.000	30	61.268.000	30	61.268.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi *****						56.984.000		56.984.000		56.984.000		56.984.000		56.984.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	71	24	56.984.000	24	56.984.000	24	56.984.000	30	56.984.000	30	56.984.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) *****						82.830.000		82.830.000		82.830.000		82.830.000		82.830.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan *****	Kelompok Masyarakat	N/A	2	82.830.000	2	82.830.000	2	82.830.000	3	82.830.000	3	82.830.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan ****	Dokumen	N/A	10	66.971.000	15	66.971.000	15	66.971.000	20	66.971.000	25	66.971.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi *****						66.971.000		66.971.000		66.971.000		66.971.000		66.971.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	36	24	66.971.000	30	66.971.000	30	66.971.000	30	66.971.000	30	66.971.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN ***						661.681.000		661.681.000		661.681.000		661.681.000		661.681.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat ***	%	N/A	17	178.061.000	19	178.061.000	21	178.061.000	23	178.061.000	25	178.061.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ****						178.061.000		178.061.000		178.061.000		178.061.000		178.061.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Meningkatnya tindaklanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil di Wilayah Kerja CDK Barat	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil ****	%	100	100	101.690.000	100	101.690.000	100	101.690.000	100	101.690.000	100	101.690.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi *****						12.400.000		12.400.000		12.400.000		12.400.000		12.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani *****	Perkara	N/A	5	12.400.000	5	12.400.000	5	12.400.000	5	12.400.000	5	12.400.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi *****						8.125.000		8.125.000		8.125.000		8.125.000		8.125.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	10	5	8.125.000	5	8.125.000	5	8.125.000	5	8.125.000	5	8.125.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi *****						8.125.000		8.125.000		8.125.000		8.125.000		8.125.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	7	5	8.125.000	5	8.125.000	5	8.125.000	5	8.125.000	5	8.125.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) *****						73.040.000		73.040.000		73.040.000		73.040.000		73.040.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan *****	Kelompok Masyarakat	N/A	5	73.040.000	5	73.040.000	5	73.040.000	5	73.040.000	5	73.040.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan di Wilayah Kerja CDK Barat	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan ****	Dokumen	N/A	10	76.371.000	15	76.371.000	15	76.371.000	20	76.371.000	25	76.371.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi *****						76.371.000		76.371.000		76.371.000		76.371.000		76.371.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	33	20	76.371.000	20	76.371.000	20	76.371.000	20	76.371.000	20	76.371.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat ***	%	N/A	72	483.620.000	72	483.620.000	72	483.620.000	100	483.620.000	100	483.620.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ****						483.620.000		483.620.000		483.620.000		483.620.000		483.620.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Meningkatnya Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan di Wilayah Kerja CDK Barat	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan ****	%	N/A	75	483.620.000	75	483.620.000	75	483.620.000	100	483.620.000	100	483.620.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan *****						483.620.000		483.620.000		483.620.000		483.620.000		483.620.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan *****	Hari Operasi	7	15	483.620.000	15	483.620.000	15	483.620.000	20	483.620.000	20	483.620.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN ***						729.221.000		729.221.000		729.221.000		729.221.000		829.221.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan ***	%	70	70	729.221.000	71	729.221.000	73	729.221.000	74	729.221.000	75	829.221.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil ****						596.321.000		596.321.000		596.321.000		596.321.000		696.321.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan ****	%	120	90	519.866.000	90	519.866.000	90	519.866.000	90	519.866.000	90	619.866.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi *****						233.623.000		233.623.000		233.623.000		233.623.000		333.623.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
			Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani *****	Perkara	2	5	233.623.000	6	233.623.000	7	233.623.000	8	233.623.000	9	333.623.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) *****						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
			Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan *****	Kelompok Masyarakat	35	35	200.000.000	35	200.000.000	35	200.000.000	35	200.000.000	35	200.000.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH
		Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah *****						86.243.000		86.243.000		86.243.000		86.243.000		86.243.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan *****	Forum	1	1	86.243.000	1	86.243.000	1	86.243.000	1	86.243.000	1	86.243.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH
			Meningkatnya pelaku usaha pergaraman dan pembudidaya ikan di air payau yang diberikan pemahaman peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaku usaha pergaraman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan ****	Orang	46	60	76.455.000	60	76.455.000	60	76.455.000	60	76.455.000	60	76.455.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi *****						76.455.000		76.455.000		76.455.000		76.455.000		76.455.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	6	10	76.455.000	10	76.455.000	15	76.455.000	15	76.455.000	20	76.455.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****						132.900.000		132.900.000		132.900.000		132.900.000		132.900.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya	Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya ****	%	90	90	44.300.000	90	44.300.000	90	44.300.000	90	44.300.000	90	44.300.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi *****						44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	19	15	44.300.000	20	44.300.000	20	44.300.000	20	44.300.000	20	44.300.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH
			Meningkatnya Pelaku Usaha Sektor Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya Yang Mengetahui Peraturan Perundangan Sektor KP	Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP ****	Orang	90	180	88.600.000	180	88.600.000	180	88.600.000	180	88.600.000	180	88.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi *****						44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
			Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	6	10	44.300.000	10	44.300.000	15	44.300.000	15	44.300.000	20	44.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH
		Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi *****						44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi *****	Pelaku Usaha	5	10	44.300.000	10	44.300.000	15	44.300.000	15	44.300.000	20	44.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	JAWA TENGAH
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN ***						1.507.527.000		1.207.527.000		1.207.527.000		1.207.527.000		1.507.527.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan ***	kg/kapita/tahun	40	18	1.507.527.000	18	1.207.527.000	19	1.207.527.000	19	1.207.527.000	19	1.507.527.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****						125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Produk Olahan Ikan yang Dihasilkan oleh Unit Pengolahan Ikan Meliputi : Pengalengan, Pembekuan, Penggaraman/Pengeringan, Pemindangan, Pengasapan, Peragian/Fermentasi, Pereduksian, Pelumatan Daging, Pengolahan Ikan Segar, Pengolahan Ikan lainnya di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah	Jumlah Produk Olahan Ikan ****	Ton	299.839	161.604	125.000.000	162.412	125.000.000	163.224	125.000.000	164.040	125.000.000	164.860	125.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****						125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko *****	Dokumen	1	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar ****						1.344.527.000		1.044.527.000		1.044.527.000		1.044.527.000		1.344.527.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			SDM Dan Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Kegiatan (Bazar, Gemarikan, Lomba Masak Ikan, Jejaring Pemasaran, Pembinaan Mutu Kepada Pelaku Usaha Perikanan, Diversifikasi Olahan Produk Perikanan, Business Matching/Kemitraan, Akses Permodalan/Pembiayaan, Peningkatan Kelembagaan, Mendukung IPRO Pengembangan Investasi Sektor Kelautan Dan Perikanan, Sarpras)	Jumlah SDM dan Pelaku Usaha yang Difasilitasi Kegiatan ****	Orang	3.500	2.000	1.344.527.000	2.000	1.044.527.000	2.000	1.044.527.000	2.000	1.044.527.000	2.000	1.344.527.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing *****						1.344.527.000		1.044.527.000		1.044.527.000		1.044.527.000		1.344.527.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing *****	Kegiatan	10	10	1.344.527.000	10	1.044.527.000	10	1.044.527.000	10	1.044.527.000	10	1.344.527.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****						38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Kegiatan Yang Difasilitasi Untuk Memperoleh Kontinuitas Bahan Baku Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Ikan; Dan Distrbusi Produk Perikanan	Fasilitasi kegiatan kontinuitas bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan; dan distrbusi produk perikanan ****	Kegiatan	1	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku *****						38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
			Meningkatnya ketersediaan bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan *****	Ton	472.223	981.000	38.000.000	985.000	38.000.000	989.000	38.000.000	993.000	38.000.000	997.000	38.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN ***						879.583.000		879.583.000		879.583.000		879.583.000		879.583.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Meningkatnya dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan ***	%	4	4	879.583.000	4	879.583.000	4	879.583.000	4	879.583.000	4	879.583.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****						175.919.000		175.919.000		175.919.000		175.919.000		175.919.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan Yang difasilitasi kelayakan mutunya	Jumlah Unit Pengolahan Ikan Yang difasilitasi kelayakan mutunya ****	Unit	88	85	175.919.000	90	175.919.000	95	175.919.000	100	175.919.000	105	175.919.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko *****						175.919.000		175.919.000		175.919.000		175.919.000		175.919.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko *****	Rekomendasi	100	105	175.919.000	110	175.919.000	115	175.919.000	120	175.919.000	125	175.919.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar ****						703.664.000		703.664.000		703.664.000		703.664.000		703.664.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan ****	Dokumen	904	550	703.664.000	600	703.664.000	650	703.664.000	700	703.664.000	750	703.664.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
		Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing *****						703.664.000		703.664.000		703.664.000		703.664.000		703.664.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing *****	Kegiatan	80	575	703.664.000	625	703.664.000	675	703.664.000	725	703.664.000	775	703.664.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
				Produksi Garam **	Ton	629.953	541.776	846.289.000	544.458	846.289.000	547.140	846.289.000	549.822	846.289.000	552.504	1.046.289.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ***						846.289.000		846.289.000		846.289.000		846.289.000		1.046.289.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat dan Lahan Kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang Difasilitasi Teknologi	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi ***	%	49	50	846.289.000	51	846.289.000	51	846.289.000	52	846.289.000	53	1.046.289.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ****						846.289.000		846.289.000		846.289.000		846.289.000		1.046.289.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			Meningkatnya Masyarakat Pesisir Yang Mendapatkan Pelatihan, Pembinaan Serta Mendapatkan Bantuan Sarpras Usaha	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan ****	Kelompok	5	10	279.321.000	10	279.321.000	10	279.321.000	10	279.321.000	10	479.321.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *****						279.321.000		279.321.000		279.321.000		279.321.000		479.321.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya *****	Orang	90	120	279.321.000	120	279.321.000	120	279.321.000	120	279.321.000	120	479.321.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil JAWA TENGAH
			Meningkatnya Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang Menerapkan Teknologi Produksi Garam	Jumlah Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang meningkat teknologinya ****	Kelompok	55	10	566.968.000	11	566.968.000	12	566.968.000	13	566.968.000	14	566.968.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman *****						566.968.000		566.968.000		566.968.000		566.968.000		566.968.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			Tersedianya Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia *****	Unit	8	10	566.968.000	11	566.968.000	12	566.968.000	13	566.968.000	14	566.968.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Kelautan dan Perikanan *								58.963.885.500		59.075.925.500		59.961.009.500		66.075.925.500		93.802.823.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan *	Angka	82	84		85		86		89		90		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan **							58.063.885.500		58.175.925.500		59.061.009.500		65.175.925.500		92.902.823.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan **	Angka	83	85	58.063.885.500	86	58.175.925.500	87	59.061.009.500	88	65.175.925.500	89	92.902.823.500	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						54.066.032.000		54.178.072.000		55.063.156.000		61.178.072.000		88.904.970.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan ***	%	100	100	54.066.032.000	100	54.178.072.000	100	55.063.156.000	100	61.178.072.000	100	88.904.970.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						48.963.672.000		48.963.672.000		48.963.672.000		48.963.672.000		48.963.672.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	1	1	48.963.672.000	1	48.963.672.000	1	48.963.672.000	1	48.963.672.000	1	48.963.672.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****						47.893.672.000		47.893.672.000		47.893.672.000		47.893.672.000		47.893.672.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	N/A	252	47.893.672.000	252	47.893.672.000	252	47.893.672.000	252	47.893.672.000	252	47.893.672.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****						920.000.000		920.000.000		920.000.000		920.000.000		920.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	N/A	1	920.000.000	1	920.000.000	1	920.000.000	1	920.000.000	1	920.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****						200.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	200.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****						0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	252	0	252	150.000.000	252	150.000.000	252	150.000.000	252	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	N/A	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****						40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	N/A	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						734.400.000		759.400.000		759.400.000		759.400.000		759.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	734.400.000	100	759.400.000	100	759.400.000	100	759.400.000	100	759.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						90.600.000		90.600.000		90.600.000		90.600.000		90.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	90.600.000	1	90.600.000	1	90.600.000	1	90.600.000	1	90.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						106.800.000		106.800.000		106.800.000		106.800.000		106.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	106.800.000	1	106.800.000	1	106.800.000	1	106.800.000	1	106.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	1	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						1.387.960.000		1.250.000.000		2.135.084.000		8.250.000.000		35.976.898.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1.387.960.000	1	1.250.000.000	1	2.135.084.000	1	8.250.000.000	1	35.976.898.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						0		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pengadaan Alat Besar *****						0		0		0		7.000.000.000		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	0	N/A	0	N/A	0	N/A	7.000.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pengadaan Mebel *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						100.000.000		100.000.000		98.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	98.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						1.187.960.000		500.000.000		1.387.084.000		500.000.000		35.226.898.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	1.187.960.000	1	500.000.000	1	1.387.084.000	1	500.000.000	1	35.226.898.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						1.655.000.000		1.655.000.000		1.655.000.000		1.655.000.000		1.655.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1	1	1.655.000.000	1	1.655.000.000	1	1.655.000.000	1	1.655.000.000	1	1.655.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						1.025.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1.025.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						295.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pemeliharaan Mebel *****						0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						154.900.000		154.900.000		154.900.000		154.900.000		154.900.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong ***	%	100	100	154.900.000	100	154.900.000	100	154.900.000	100	154.900.000	100	154.900.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						30.050.000		30.050.000		30.050.000		30.050.000		30.050.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	30.050.000	100	30.050.000	100	30.050.000	100	30.050.000	100	30.050.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi PEMALANG
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						6.550.000		6.550.000		6.550.000		6.550.000		6.550.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	6.550.000	12	6.550.000	12	6.550.000	12	6.550.000	12	6.550.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi PEMALANG
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	2.000.000	121	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						82.850.000		82.850.000		82.850.000		82.850.000		82.850.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	82.850.000	1	82.850.000	1	82.850.000	1	82.850.000	1	82.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						23.850.000		23.850.000		23.850.000		23.850.000		23.850.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	23.850.000	1	23.850.000	1	23.850.000	1	23.850.000	1	23.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi PEMALANG
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						106.500.000		106.500.000		106.500.000		106.500.000		106.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto ***	%	100	100	106.500.000	100	106.500.000	100	106.500.000	100	106.500.000	100	106.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						1.850.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						8.650.000		8.650.000		8.650.000		8.650.000		8.650.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	8.650.000	12	8.650.000	12	8.650.000	12	8.650.000	12	8.650.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi PEKALONGAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	31.000.000	12	31.000.000	12	31.000.000	12	31.000.000	12	31.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	KOTA PEKALONGAN OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						57.500.000		57.500.000		57.500.000		57.500.000		57.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	57.500.000	1	57.500.000	1	57.500.000	1	57.500.000	1	57.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi PEKALONGAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi PEKALONGAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						240.922.000		240.922.000		240.922.000		240.922.000		240.922.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor ***	%	100	100	240.922.000	100	240.922.000	100	240.922.000	100	240.922.000	100	240.922.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						77.000.000		77.000.000		77.000.000		77.000.000		77.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	77.000.000	100	77.000.000	100	77.000.000	100	77.000.000	100	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						40.500.000		40.500.000		40.500.000		40.500.000		40.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	40.500.000	12	40.500.000	12	40.500.000	12	40.500.000	12	40.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						121.922.000		121.922.000		121.922.000		121.922.000		121.922.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	121.922.000	1	121.922.000	1	121.922.000	1	121.922.000	1	121.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						6.922.000		6.922.000		6.922.000		6.922.000		6.922.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	6.922.000	1	6.922.000	1	6.922.000	1	6.922.000	1	6.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BATANG OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						128.400.000		128.400.000		128.400.000		128.400.000		128.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang ***	%	100	100	128.400.000	100	128.400.000	100	128.400.000	100	128.400.000	100	128.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						50.400.000		50.400.000		50.400.000		50.400.000		50.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	50.400.000	12	50.400.000	12	50.400.000	12	50.400.000	12	50.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						44.400.000		44.400.000		44.400.000		44.400.000		44.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	44.400.000	12	44.400.000	12	44.400.000	12	44.400.000	12	44.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	KENDAL OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						144.950.000		144.950.000		144.950.000		144.950.000		144.950.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak ***	%	100	100	144.950.000	100	144.950.000	100	144.950.000	100	144.950.000	100	144.950.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						53.200.000		53.200.000		53.200.000		53.200.000		53.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	53.200.000	12	53.200.000	12	53.200.000	12	53.200.000	12	53.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	3.200.000	12	3.200.000	12	3.200.000	12	3.200.000	12	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						46.750.000		46.750.000		46.750.000		46.750.000		46.750.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	46.750.000	1	46.750.000	1	46.750.000	1	46.750.000	1	46.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						21.750.000		21.750.000		21.750.000		21.750.000		21.750.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	21.750.000	1	21.750.000	1	21.750.000	1	21.750.000	1	21.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						190.500.000		190.500.000		190.500.000		190.500.000		190.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa ***	%	100	100	190.500.000	100	190.500.000	100	190.500.000	100	190.500.000	100	190.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	18.500.000	100	18.500.000	100	18.500.000	100	18.500.000	100	18.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						119.200.000		119.200.000		119.200.000		119.200.000		119.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	119.200.000	12	119.200.000	12	119.200.000	12	119.200.000	12	119.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	1.600.000	12	1.600.000	12	1.600.000	12	1.600.000	12	1.600.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						117.600.000		117.600.000		117.600.000		117.600.000		117.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	117.600.000	12	117.600.000	12	117.600.000	12	117.600.000	12	117.600.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						52.800.000		52.800.000		52.800.000		52.800.000		52.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	52.800.000	1	52.800.000	1	52.800.000	1	52.800.000	1	52.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						22.100.000		22.100.000		22.100.000		22.100.000		22.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	22.100.000	1	22.100.000	1	22.100.000	1	22.100.000	1	22.100.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	5.700.000	1	5.700.000	1	5.700.000	1	5.700.000	1	5.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	JEPARA OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						119.430.000		119.430.000		119.430.000		119.430.000		119.430.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan ***	%	100	100	119.430.000	100	119.430.000	100	119.430.000	100	119.430.000	100	119.430.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						24.910.000		24.910.000		24.910.000		24.910.000		24.910.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	24.910.000	100	24.910.000	100	24.910.000	100	24.910.000	100	24.910.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						3.250.000		3.250.000		3.250.000		3.250.000		3.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	3.250.000	1	3.250.000	1	3.250.000	1	3.250.000	1	3.250.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEGAL
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						15.900.000		15.900.000		15.900.000		15.900.000		15.900.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	15.900.000	1	15.900.000	1	15.900.000	1	15.900.000	1	15.900.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEGAL
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						5.760.000		5.760.000		5.760.000		5.760.000		5.760.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	5.760.000	1	5.760.000	1	5.760.000	1	5.760.000	1	5.760.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEGAL
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						43.080.000		43.080.000		43.080.000		43.080.000		43.080.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	43.080.000	12	43.080.000	12	43.080.000	12	43.080.000	12	43.080.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						2.280.000		2.280.000		2.280.000		2.280.000		2.280.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	2.280.000	12	2.280.000	12	2.280.000	12	2.280.000	12	2.280.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEGAL
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						40.800.000		40.800.000		40.800.000		40.800.000		40.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	40.800.000	12	40.800.000	12	40.800.000	12	40.800.000	12	40.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEGAL
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						51.440.000		51.440.000		51.440.000		51.440.000		51.440.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	51.440.000	1	51.440.000	1	51.440.000	1	51.440.000	1	51.440.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						28.190.000		28.190.000		28.190.000		28.190.000		28.190.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	28.190.000	1	28.190.000	1	28.190.000	1	28.190.000	1	28.190.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEGAL
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	2.750.000	1	2.750.000	1	2.750.000	1	2.750.000	1	2.750.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEGAL
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						20.500.000		20.500.000		20.500.000		20.500.000		20.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	20.500.000	1	20.500.000	1	20.500.000	1	20.500.000	1	20.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi TEGAL
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						134.506.000		134.506.000		134.506.000		134.506.000		134.506.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan ***	%	100	100	134.506.000	100	134.506.000	100	134.506.000	100	134.506.000	100	134.506.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						55.006.000		55.006.000		55.006.000		55.006.000		55.006.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	55.006.000	100	55.006.000	100	55.006.000	100	55.006.000	100	55.006.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						42.546.000		42.546.000		42.546.000		42.546.000		42.546.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	42.546.000	1	42.546.000	1	42.546.000	1	42.546.000	1	42.546.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						11.960.000		11.960.000		11.960.000		11.960.000		11.960.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	11.960.000	12	11.960.000	12	11.960.000	12	11.960.000	12	11.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						34.500.000		34.500.000		34.500.000		34.500.000		34.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	34.500.000	12	34.500.000	12	34.500.000	12	34.500.000	12	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						34.000.000		34.000.000		34.000.000		34.000.000		34.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	34.000.000	12	34.000.000	12	34.000.000	12	34.000.000	12	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur ***	%	100	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						110.500.000		110.500.000		110.500.000		110.500.000		110.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	110.500.000	100	110.500.000	100	110.500.000	100	110.500.000	100	110.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						86.580.000		86.580.000		86.580.000		86.580.000		86.580.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	86.580.000	1	86.580.000	1	86.580.000	1	86.580.000	1	86.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						20.920.000		20.920.000		20.920.000		20.920.000		20.920.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	20.920.000	12	20.920.000	12	20.920.000	12	20.920.000	12	20.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						35.200.000		35.200.000		35.200.000		35.200.000		35.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	35.200.000	12	35.200.000	12	35.200.000	12	35.200.000	12	35.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						34.200.000		34.200.000		34.200.000		34.200.000		34.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	34.200.000	12	34.200.000	12	34.200.000	12	34.200.000	12	34.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000		44.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	44.300.000	1	44.300.000	1	44.300.000	1	44.300.000	1	44.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						4.300.000		4.300.000		4.300.000		4.300.000		4.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	4.300.000	1	4.300.000	1	4.300.000	1	4.300.000	1	4.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						193.973.000		193.973.000		193.973.000		193.973.000		193.973.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat ***	%	100	100	193.973.000	100	193.973.000	100	193.973.000	100	193.973.000	100	193.973.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						62.500.000		62.500.000		62.500.000		62.500.000		62.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	62.500.000	100	62.500.000	100	62.500.000	100	62.500.000	100	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEGAL

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEGAL
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						27.600.000		27.600.000		27.600.000		27.600.000		27.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	1	27.600.000	1	27.600.000	1	27.600.000	1	27.600.000	1	27.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						41.200.000		41.200.000		41.200.000		41.200.000		41.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	41.200.000	12	41.200.000	12	41.200.000	12	41.200.000	12	41.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEGAL
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						38.200.000		38.200.000		38.200.000		38.200.000		38.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	38.200.000	12	38.200.000	12	38.200.000	12	38.200.000	12	38.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEGAL

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						90.273.000		90.273.000		90.273.000		90.273.000		90.273.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	90.273.000	1	90.273.000	1	90.273.000	1	90.273.000	1	90.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						27.273.000		27.273.000		27.273.000		27.273.000		27.273.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	27.273.000	1	27.273.000	1	27.273.000	1	27.273.000	1	27.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEGAL

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEGAL
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi TEGAL
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						372.180.000		372.180.000		372.180.000		372.180.000		372.180.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari ***	%	100	100	372.180.000	100	372.180.000	100	372.180.000	100	372.180.000	100	372.180.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	46.000.000	100	46.000.000	100	46.000.000	100	46.000.000	100	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						211.180.000		211.180.000		211.180.000		211.180.000		211.180.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	211.180.000	12	211.180.000	12	211.180.000	12	211.180.000	12	211.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	2.700.000	12	2.700.000	12	2.700.000	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						208.480.000		208.480.000		208.480.000		208.480.000		208.480.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	208.480.000	12	208.480.000	12	208.480.000	12	208.480.000	12	208.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						43.000.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	43.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						164.240.000		164.240.000		164.240.000		164.240.000		164.240.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Juwana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana ***	%	100	100	164.240.000	100	164.240.000	100	164.240.000	100	164.240.000	100	164.240.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						28.740.000		28.740.000		28.740.000		28.740.000		28.740.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	28.740.000	100	28.740.000	100	28.740.000	100	28.740.000	100	28.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						6.740.000		6.740.000		6.740.000		6.740.000		6.740.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	6.740.000	12	6.740.000	12	6.740.000	12	6.740.000	12	6.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						64.100.000		64.100.000		64.100.000		64.100.000		64.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	64.100.000	12	64.100.000	12	64.100.000	12	64.100.000	12	64.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						61.100.000		61.100.000		61.100.000		61.100.000		61.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	61.100.000	12	61.100.000	12	61.100.000	12	61.100.000	12	61.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						71.400.000		71.400.000		71.400.000		71.400.000		71.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	71.400.000	1	71.400.000	1	71.400.000	1	71.400.000	1	71.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						31.400.000		31.400.000		31.400.000		31.400.000		31.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	31.400.000	1	31.400.000	1	31.400.000	1	31.400.000	1	31.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi PATI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						571.433.000		571.433.000		571.433.000		571.433.000		571.433.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung ***	%	100	100	571.433.000	100	571.433.000	100	571.433.000	1.001	571.433.000	100	571.433.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						107.000.000		107.000.000		107.000.000		107.000.000		107.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	107.000.000	100	107.000.000	100	107.000.000	100	107.000.000	100	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000		57.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	57.000.000	1	57.000.000	1	57.000.000	1	57.000.000	1	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						284.433.000		284.433.000		284.433.000		284.433.000		284.433.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	284.433.000	12	284.433.000	12	284.433.000	12	284.433.000	12	284.433.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						2.433.000		2.433.000		2.433.000		2.433.000		2.433.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	2.433.000	12	2.433.000	12	2.433.000	12	2.433.000	12	2.433.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						282.000.000		282.000.000		282.000.000		282.000.000		282.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	282.000.000	12	282.000.000	12	282.000.000	12	282.000.000	12	282.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						164.064.500		164.064.500		164.064.500		164.064.500		164.064.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending ***	%	100	100	164.064.500	100	164.064.500	100	164.064.500	100	164.064.500	100	164.064.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						37.064.500		37.064.500		37.064.500		37.064.500		37.064.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	37.064.500	100	37.064.500	100	37.064.500	100	37.064.500	100	37.064.500	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						7.551.500		7.551.500		7.551.500		7.551.500		7.551.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	7.551.500	1	7.551.500	1	7.551.500	1	7.551.500	1	7.551.500	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						6.413.000		6.413.000		6.413.000		6.413.000		6.413.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	6.413.000	1	6.413.000	1	6.413.000	1	6.413.000	1	6.413.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						23.100.000		23.100.000		23.100.000		23.100.000		23.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	23.100.000	12	23.100.000	12	23.100.000	12	23.100.000	12	23.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						66.800.000		66.800.000		66.800.000		66.800.000		66.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	66.800.000	12	66.800.000	12	66.800.000	12	66.800.000	12	66.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						64.800.000		64.800.000		64.800.000		64.800.000		64.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	64.800.000	12	64.800.000	12	64.800.000	12	64.800.000	12	64.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						60.200.000		60.200.000		60.200.000		60.200.000		60.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	60.200.000	1	60.200.000	1	60.200.000	1	60.200.000	1	60.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KEBUMEN OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						480.355.000		480.355.000		480.355.000		480.355.000		480.355.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan ***	%	100	100	480.355.000	100	480.355.000	100	480.355.000	100	480.355.000	100	480.355.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						42.105.000		42.105.000		42.105.000		42.105.000		42.105.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	42.105.000	100	42.105.000	100	42.105.000	100	42.105.000	100	42.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						6.405.000		6.405.000		6.405.000		6.405.000		6.405.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	6.405.000	1	6.405.000	1	6.405.000	1	6.405.000	1	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						25.700.000		25.700.000		25.700.000		25.700.000		25.700.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	25.700.000	1	25.700.000	1	25.700.000	1	25.700.000	1	25.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						313.300.000		313.300.000		313.300.000		313.300.000		313.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	313.300.000	12	313.300.000	12	313.300.000	12	313.300.000	12	313.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						3.300.000		3.300.000		3.300.000		3.300.000		3.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	3.300.000	12	3.300.000	12	3.300.000	12	3.300.000	12	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	310.000.000	12	310.000.000	12	310.000.000	12	310.000.000	12	310.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						124.950.000		124.950.000		124.950.000		124.950.000		124.950.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	124.950.000	1	124.950.000	1	124.950.000	1	124.950.000	1	124.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						31.950.000		31.950.000		31.950.000		31.950.000		31.950.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	31.950.000	1	31.950.000	1	31.950.000	1	31.950.000	1	31.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						641.500.000		641.500.000		641.500.000		641.500.000		641.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya ***	%	100	100	641.500.000	100	641.500.000	100	641.500.000	100	641.500.000	100	641.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						508.500.000		508.500.000		508.500.000		508.500.000		508.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	508.500.000	12	508.500.000	12	508.500.000	12	508.500.000	12	508.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						505.000.000		505.000.000		505.000.000		505.000.000		505.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	505.000.000	12	505.000.000	12	505.000.000	12	505.000.000	12	505.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						107.000.000		107.000.000		107.000.000		107.000.000		107.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	107.000.000	1	107.000.000	1	107.000.000	1	107.000.000	1	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan **							900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan **	Angka	3	3	900.000.000	3	900.000.000	3	900.000.000	3	900.000.000	4	900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan ***	%	100	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****						900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****						400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	100	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****						450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	N/A	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****						27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	180	180	27.000.000	180	27.000.000	180	27.000.000	180	27.000.000	180	27.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****						23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	1	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (IKLH) *								2.511.067.000		1.511.067.000		1.511.067.000		1.511.067.000		1.511.067.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Persentase Luasan Mangrove Yang Berkualitas Baik *	%	N/A	67		67		67		67		68		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi **							2.511.067.000		1.511.067.000		1.511.067.000		1.511.067.000		1.511.067.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi **	%	1	1	2.511.067.000	1	1.511.067.000	1	1.511.067.000	1	1.511.067.000	1	1.511.067.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ***						397.839.000		397.839.000		397.839.000		397.839.000		397.839.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan ***	%	N/A	0	397.839.000	0	397.839.000	0	397.839.000	0	397.839.000	1	397.839.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ****						397.839.000		397.839.000		397.839.000		397.839.000		397.839.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja CDK Selatan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola ****	Kawasan	N/A	1	397.839.000	1	397.839.000	1	397.839.000	1	397.839.000	1	397.839.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat *****						76.002.000		76.002.000		76.002.000		76.002.000		76.002.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola *****	Ha	N/A	289	76.002.000	289	76.002.000	289	76.002.000	289	76.002.000	289	76.002.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *****						321.837.000		321.837.000		321.837.000		321.837.000		321.837.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
			Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi *****	Ha	242	2	321.837.000	3	321.837.000	3	321.837.000	3	321.837.000	4	321.837.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ***						1.545.670.000		545.670.000		545.670.000		545.670.000		545.670.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur ***	%	N/A	0	1.545.670.000	0	545.670.000	0	545.670.000	0	545.670.000	1	545.670.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ****						1.545.670.000		545.670.000		545.670.000		545.670.000		545.670.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja CDK Timur	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola ****	Kawasan	2	3	1.545.670.000	3	545.670.000	3	545.670.000	3	545.670.000	3	545.670.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat *****						1.061.173.000		61.173.000		61.173.000		61.173.000		61.173.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola *****	Ha	77.278	773	1.061.173.000	773	61.173.000	773	61.173.000	773	61.173.000	773	61.173.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *****						484.497.000		484.497.000		484.497.000		484.497.000		484.497.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
			Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi *****	Ha	2	2	484.497.000	3	484.497.000	3	484.497.000	3	484.497.000	4	484.497.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ***						567.558.000		567.558.000		567.558.000		567.558.000		567.558.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat ***	%	N/A	0	567.558.000	0	567.558.000	0	567.558.000	0	567.558.000	0	567.558.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi ****						567.558.000		567.558.000		567.558.000		567.558.000		567.558.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja CDK Barat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola ****	Kawasan	2	2	567.558.000	2	567.558.000	2	567.558.000	2	567.558.000	2	567.558.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat *****						367.558.000		367.558.000		367.558.000		367.558.000		367.558.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
						2024 (R)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola *****	Ha	4.254	4.254	367.558.000	4.254	367.558.000	4.254	367.558.000	4.254	367.558.000	4.254	367.558.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *****						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
			Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi *****	Ha	2	2	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	4	200.000.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

Tabel 4.2
Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	**Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan** dan ketersediaan day care untuk buruh di kawasan industri	- Melakukan verifikasi lokasi dan kelengkapan dokumen pendirian SPBN - Penerbitan surat permohonan rekomendasi pendirian SPBN oleh JPEN	- Tersedianya SPBN BUMD JPEN	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil/Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
		Regulasi penyediaan pupuk bagi pembudidaya ikan	Tersedianya regulasi penyediaan pupuk bagi pembudidaya ikan target 1 Dokumen	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya/Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat/Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	**Program asuransi** gagal panen bagi petani dan **nelayan** melalui Jamkrida	Bantuan premi asuransi untuk nelayan skala kecil	Nelayan yang terlindungi asuransi jiwa 10.000 Orang	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil/Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	**Normalisasi bantaran muara**	- Pemeliharaan muara dan jetty di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong, Kab. Pemalang	Tersedianya sarana prasarana Pelabuhan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/Penetapan Lokasi

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	untuk kapal tradisional	- Pemeliharaan muara dan jetty di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang, Kab. Kendal - Pemeliharaan muara dan kolam Pelabuhan Perikanan Pantai Logending, Kab. Kebumen - Pemeliharaan kolam pelabuhan, muara, dan *levelling* kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, Kab. Pekalongan - Pemeliharaan kolam Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor, Kab. Batang - Pemeliharaan kolam pelabuhan, muara pelabuhan, dan *levelling* kawasan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Kab. Demak - Pemeliharaan kolam Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa, Kab. Jepara - Pemeliharaan kolam Sentra Pendaratan Ikan Banyutowo, Kab. Pati - Pemeliharaan muara, kolam, dan jetty Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan, Kab. Tegal - Pemeliharaan Kolam Pelabuhan PPP Bajomulyo - Pemeliharaan Kolam Pelabuhan, rehabilitasi breakwater, dan rehabilitasi drainase Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari - Pemeliharaan kolam dan pembangunan	Perikanan yang layak di 2 Pelabuhan Perikanan Nusantara, 9 Pelabuhan Perikanan Pantai, dan 3 Sentra Pendaratan Ikan	Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi/ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Subkegiatan
		breakwater Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung		
4	**Penghapusan hutang** petani, **nelayan**, UMKM	- Melakukan identifikasi debitur - Melakukan Proses Penghapusan Piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah	Terselesainya Piutang TPI senilai Rp 4.105.302.718	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5	**Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila**	- Revitalisasi Tambak Nila Salin di 5 Kabupaten Kota - Pengembangan pakan mandiri - Bantuan sarpras nila salin - Polikultur nila-udang - Bantuan Calon Induk dan Pakan Untuk Masyarakat - Bantuan sarpras pembudidayaan ikan tawar/ payau/ laut	- Meningkatnya produksi ikan, terutama nila salin - Tersedianya unit produksi pakan mandiri dengan target bantuan 5 Paket - Tersedianya tambak nila salin produktif hasil revitalisasi 50 Hektar	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya / Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat/Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6	**Penyediaan benih yang berkualitas**	- Penyediaan Calon Induk dan Benih Calon Induk di Loka Loka PBI : Janti, Muntilan, Ngrajek, Ambarawa, Randudongkal, Singasari dan POS PBI Tambaksogra	Tersedianya sarana prasarana perbenihan yang layak untuk menghasilkan benih	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya/Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat/Penyediaan Sarana

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Subkegiatan
		- Penyediaan Benih Nila Salin di Loka Loka PBI : Janti, Muntilan, Ngrajek, Ambarawa, Randudongkal, Singasari, POS PBI Tambaksogra, Loka Maribaya dan Loka Tugu - Rehab Sarana dan Prasarana Loka PBI: Janti, Muntilan, Ngrajek, Ambarawa, Randudongkal, Singasari, POS PBI Tambaksogra, Loka Maribaya dan Loka Tugu	berkualitas dengan target 6.000.000 ekor benih/tahun	Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7	**Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan** petani **perempuan**	- Pelatihan diversifikasi produk perikanan - Pelatihan manajemen keuangan	Meningkatnya kapasitas SDM dan literasi keuangan perempuan pesisir Target : 17 Kabupaten/Kota Pesisir, @Kab/Kota 50 Peserta.	- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan/Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar/Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Subkegiatan
				- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil/Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8	Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui **Mageri Segoro** untuk mengamankan garis pantai	Rehabilitasi ekosistem mangrove	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 300.000 bibit mangrove	- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil/Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi/ Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9	Pembelian hasil panen nelayan oleh BUMD **(pelatihan penggunaan teknologi GPS pd nelayan, pelatihan petambak garam, penyuluhan**	Pelatihan penggunaan teknologi GPS pada nelayan (VMS)	Terfasilitasinya penggunaan VMS oleh kapal perikanan sebanyak 1000 Kapal	- Program Pengawasa Sumberdaya Kelautan dan Perikanan / Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 mil / Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Subkegiatan
	/pelatihan utk meningkatkan kualitas panen)	- Pelatihan petambak garam	- Meningkatnya kapasitas petambak garam sebanyak 150 orang	- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil/Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		- Penyuluhan/pelatihan utk meningkatkan kualitas panen (Penilaian dan pembinaan Produsen Pakan Ikan Bersertifikat CPPIB, CPIB, serta Fasilitasi perizinan berusaha sektor perikanan budidaya)	Meningkatnya Kompetensi petambak 40 Orang	- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya/Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat/Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Pembangunan kelautan dan perikanan Jawa Tengah untuk mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan serta Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaanya tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan dan merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP). Adapun rincian IKU sebagaimana Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	1,5	1	1	2	2,1	2,2	2,2	2,4	2,4
2	Persentase Luasan Mangrove Yang Berkualitas Baik	n/a	n/a	66,72	66,88	67,03	67,19	67,34	67,5	67,5
3	Produksi perikanan	940.018	968.353,80	952.717,50	954.029	969.649,90	985.589,40	1.001.857,10	1.018.462,80	4.929.588,2
4	Produksi Garam	595.984,41	629.952,95	539.293,69	541.775,75	544.457,81	547.139,84	549.821,93	552.503,98	2.735.699,31
5	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81	82	83	84	85	86	89	90	90

Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel 4.4

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal		Target Capaian						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase kawasan konservasi daerah yang operasional dengan	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Produksi perikanan tangkap	63,76	125,44	100	100	100	100	100	100	
3	Produksi perikanan budidaya	102,7	92,47	91,74	93,95	94	94,05	94,10	94,15	
4	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	70	70	70	71	73	74	75	75	

BAB
V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan memperhatikan keselarasan kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045, dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 mencakup Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran pada kurun waktu lima tahun (tahun 2025 - 2029). Sasaran dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaanya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain : 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran rencana strategis; 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besar mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Renstra; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan serta kualitas ekosistem kelautan dan perikanan, meningkatkan pangan biru, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan pergaraman, meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem kelautan dan perikanan serta mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029;
2. Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPT di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*Outcome*) Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029;
3. Pejabat eselon IV, atau ketua Kelompok Kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*Ouput*) Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029;
4. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang, Cabang Dinas dan UPT pada di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
5. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala, evaluasi pencapain sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun;
7. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, sehingga memerlukan perbaikan atau revisi maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025- 2029 jika pada kesempatan yang sama RPJMD Provinsi Jawa Tengah dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah tahun 2025-2029 ini telah disusun sesuai perkembangan dinamika politik, sosial, budaya dan isu-isu permasalahan terkini, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, implementasi penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, baik di jajaran struktural

maupun fungsional dalam melaksanakan kualitas pelayanan dasar dan tugas sehari-hari. Renstra juga tertuang tugas pokok dan sasaran pembangunan perikanan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis serta dicapai hasil yang optimal, selaras, serasi, seimbang dan berkualitas sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Akhir kata diharapkan peran serta masyarakat khususnya pelaku usaha perikanan dan pergaraman maupun stakeholder terkait untuk secara bersama sama mewujudkan Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju Berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Semarang, September 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah

Endi Fajz Effendi, S.Pi., MA
Pembina Utama Muda
NIP. 197109091996031006

POHON KINERJA- DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

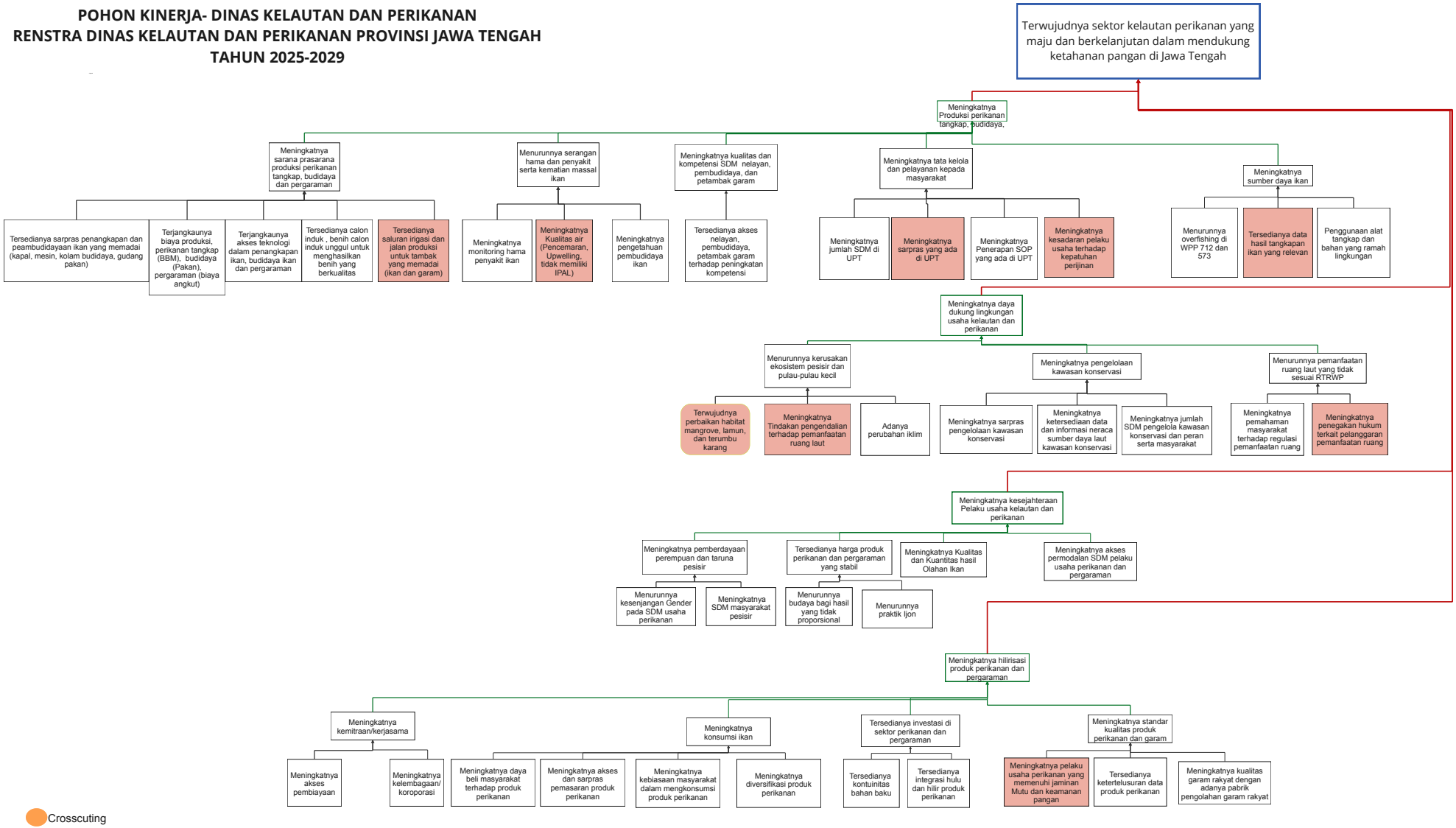

CASCADING DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020-2039

Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (PE)

Indikator : Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan

DO : Nilai Tambah Barang dan Jasa yang dihasilkan dari kegiatan sub sektor perikanan

Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perikanan
Indikator : Pertumbuhan Nilai Tambah Produk Perikanan
Target : 5,00
Sat : Persentase
Definisi : Pertumbuhan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2015

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Indikator : Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Target : 100,00
Sat : Persentase
Definisi : Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Ikan
Indikator : Indeks Pengelolaan Sumberdaya Ikan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan sumberdaya ikan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ruang Laut
Indikator : Indeks Pengelolaan Ruang Laut
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan ruang laut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Indikator : Indeks Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Indikator : Indeks Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan
Target : 0,70
Sat : Persentase
Definisi : Indeks pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikan

Tabel
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (PE)						
	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan	Menurunnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Risiko Strategis	Semakin jauhnya wilayah tangkapan ikan, adanya hama penyakit ikan, cuaca buruk dan tingginya biaya operasi/produksi	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Masyarakat
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah ikan hasil tangkapan di laut jawa menurun	Risiko Strategis	Kerusakan habitat ikan	Lokasi penangkapan ikan semakin jauh dan kebutuhan perbekalan melaut bertambah	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan tangkap
2	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan	Nelayan kecil tidak mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan	Risiko Operasional	Nelayan kecil belum memiliki kartu identitas nelayan	Nelayan tidak mendapatkan pertanggungan apabila terjadi kecelakaan kerja	Pemerintah dan nelayan kecil
3		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah nelayan ditingkatkan kompetensinya	Nelayan/awak kapal perikanan tidak dapat bekerja sesuai dengan prosedur diatas kapal	Risiko Operasional	'Nelayan/awak kapal perikanan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang minim mengenai keselamatan kerja dan prosedur kerja di atas kapal	1. Resiko kecelakaan pada kapal perikanan; 2.Nelayan tidak bisa mendapatkan sertifikat keterampilan dan kompetensi	Pemerintah dan Pelaku Usaha perikanan tangkap/ Nelayan
4		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Perikanan Tangkap yang dikumpulkan dan diperiksa					
5		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Ketertiban nelayan yang rendah dalam melengkapi dokumen kapal perikanan sesuai aturan yang berlaku dan memberikan gratifikasi untuk dibantu dipercepat dokumen perizinannya	Risiko Fraud	'Keterbatasan kemampuan SDM nelayan dalam mengurus perijinan kapal secara online	1. Denda Administrasi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang berlaku; '2. Nelayan tidak bisa berangkat melaut	Pelaku Usaha Sektor Perikanan Tangkap
6		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan yang disusun	Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Risiko Operasional	Kekurangan data pendukung yang akurat dalam penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan dan kondisi kawasan pelabuhan yang sudah berubah	Pengembangan kawasan Pelabuhan Perikanan tidak optimal	pengguna kawasan pelabuhan
7	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah.	Risiko Operasional	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah.	Pelayanan kepelabuhanan tidak terlaksana secara optimal.	PPP Tegalsari dan penerima layanan kepelabuhanan di PPP Tegalsari.

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong	Pelayanan kepada masyarakat kawasan PPP Asemdoyong tidak berjalan dengan baik	Risiko Operasional	Tidak Tersedia Fasilitas Sarana Kebersihan di PPP Asemdoyong secara memadai	Masyarakat Pengguna Kawasan Tidak Terfasilitasi Sarana Kebersihannya dengan Baik	Pengguna Kawasan, Nelayan dan Pelaku Usaha
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong	Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Tidak Berjalan dengan Baik dan Nyaman	Risiko Operasional	Kurangnya sarana pas masuk yang nyaman dan representatif bagi petugas	Pendapatan Retribusi Pas Masuk berkurang	Pengguna kawasan, Masyarakat dan Kantor PPP Asemdoyong
10	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhan	Risiko Operasional	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah.	Pelayanan kepelabuhanan tidak terlaksana secara optimal.	PPP Wonokerto dan penerima layanan kepelabuhanan di PPP Wonokerto.
11	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	Peraturan Pemerintah yang terkait dengan kepelabuhanan dapat dilaksanakan dengan lancar	Risiko Operasional	Pelayanan tidak terganggu	pelaku usaha merasa puas dengan pelayanan di PPP Klidang Lor	pegawai dan stakeholder
12	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	Pengelolaan perikanan tangkap yang telah ditetapkan belum bisa dilaksanakan dengan baik	Risiko Operasional	Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan ikan belum memadai	Nilai produksi perikanan tangkap dan ekonomi menurun	Masyarakat, PPP Tawang
13	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	Pelayanan kepelabuhanan tidak tercapai	Risiko Operasional	Pelayanan buruk dan sarpras tidak memadai	Nelayan tidak dapat melaut dan mendaratkan ikan	Nelayan, Masyarakat
14	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	Jumlah Staf yang belum memenuhi kebutuhan di Analisis Beban Kerja (ABK)	Risiko Operasional	Kebijakan di level OPD terkait pembatasan perekrutan tenaga honorer serta kurangnya penambahan jumlah pegawai ASN pada PPP Bajomulyo	Pelayanan kepelabuhanan tidak terlaksana dengan optimal	PPP Bajomulyo dan Masyarakat Penerima Layanan Kepelabuhanan
15	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	Ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung rendah	Risiko Operasional	- Keterbatasan jumlah, kompetensi dan integritas SDM - Belum adanya investor	Kegiatan penangkapan ikan terhambat	Pelaku usaha penangkapan ikan
16	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhan	Risiko Operasional	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah	Pelayanan kepelabuhanan tidak terlaksana secara optimal	PPP Karimunjawa dan penerima layanan kepelabuhanan
17	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	Pelayanan Kepelabuhan tidak maksimal	Risiko Reputasi	Tidak tersedianya sapras yang memadai	Rendahnya kepuasan publik atas layanan PPP Lohgending	PPP Lohgending, masyarakat nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan keamanan operasional pelabuhan tidak berjalan optimal	Risiko Operasional	kurangnya sapras dan pengawasan kegiatan nelayan di kawasan pelabuhan	Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan dan kegiatan operasional kapal perikanan tidak optimal, Jumlah kapal di kawasan pelabuhan kurang termonitor	PPP Lohgending, Masyarakat nelayan
19	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan	Risiko Operasional	kurangnya fasilitas yang memadai	pemanfaatan Fasilitas pelabuhan terlaksana kurang optimal	PPP Lohgending, Masyarakat pelaku usaha perikanan
20	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	percepatan pengembangan pelabuhan terhambat	Risiko Operasional	Belum adanya sertifikat tanah pelabuhan sebagai salah satu bentuk penguasaan terhadap suatu wilayah kerja	Penyusunan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) terhambat	PPP Lohgending
21	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	kurangnya fasilitas pokok, penunjang, fungsional yang dimiliki pelabuhan	Risiko Operasional	sapras tidak memadai	Kegiatan operasional pelabuhan terhambat	PPP Lohgending, Nelayan
22	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	nelayan belum terjamin oleh asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan/pemilik kapal akan pentingnya asuransi	Nelayan tidak memperoleh santunan jika terjadi laka laut	PPP Lohgending, Nelayan
23	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	SDM tidak kompeten dan kurang terampil	Risiko Operasional	SDM tidak cakap melayani	Pelayanan PPP Lohgending tidak optimal	PPP Lohgending, Nelayan
24	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	Terhambatnya pelayanan kepelabuhanan yang diberikan kepada nelayan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana dan SDM di PPP Larangan	Penurunan nilai produksi perikanan tangkap dan ekonomi di PPP Larangan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
25	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan					
26	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Fasilitas Pelabuhan Perikanan banyak mengalami kerusakan (sedang dan parah)	Risiko Operasional	Kondisi wilayah pelabuhan yang terkena rob dan minimnya anggaran untuk pembangunan kawasan PPP Tegalsari	Fasilitas Pelabuhan Perikanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal	PPP Tegalsari dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)
27	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Pemilihan/penunjukan penyedia jasa oleh Tim Pokja PBJ yang tidak kompeten	Risiko Fraud	Persekongkolan yang dilakukan oleh Tim Pokja PBJ dengan calon penyedia jasa; penurunan harga penawaran sampai dibawah 80%; gratifikasi dan suap	Penurunan kualitas output pekerjaan dengan kemungkinan terburuknya adalah putus kontrak; memburuknya citra/image Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng, PPP Tegalsri dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)
28	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Pelayanan kepada masyarakat kawsan PPP Asemdoyong tidak berjalan dengan baik	Risiko Operasional	Tidak Tersedia Fasilitas Sarana Kebersihan di PPP Asemdoyong secara memadai	Masyarakat Pengguna Kawasan Tidak Terfasilitasi Sarana Kebersihannya dengan Baik	Pengguna Kawasan, Nelayan dan Pelaku Usaha
29	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Pelaku usaha tidak memiliki sumber air bersih yang cukup	Risiko Operasional	Tidak Tersedia Fasilitas Sumber Air Bersih yang memadai bagi para pelaku usaha kawasan PPP Asemdoyong	Pelaku usaha kesulitan dalam memenuhi kebutuhasn air bersih guna mendukung usahanya	Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemerintah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
30	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Fasilitas pelabuhan kurang memadai dan banyak yang mengalami penurunan fungsi	Risiko Operasional	Banyaknya kapal yang melakukan bongkar ikan melebihi kapasitas dermaga, dan letak pelabuhan di DAS sungai elon sehingga tetjadi pendangkalan terutama di muara sungai	Terjadi antrian yang panjang saat lelang pada musim ikan dan nelayan mengalami kesulitan pada saat keluar dan masuk pelabuhan.	PPP Asemdoyong dan masyarakat nelayan.
31	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Fasilitas Pelabuhan Perikanan banyak mengalami kerusakan (sedang dan parah)	Risiko Operasional	Kondisi wilayah pelabuhan yang terkena rob dan minimnya anggaran untuk pembangunan kawasan PPP Wonokerto	Fasilitas Pelabuhan Perikanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal	PPP Wonokerto dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)
32	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Pemilihan/penunjukan penyedia jasa oleh Tim Pokja PBJ yang tidak kompeten	Risiko Fraud	Persekongkolan yang dilakukan oleh Tim Pokja PBJ dengan calon penyedia jasa; penurunan harga penawaran sampai dibawah 80%; gratifikasi dan suap	Penurunan kualitas output pekerjaan dengan kemungkinan terburuknya adalah putus kontrak; memburuknya citra/image Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng, PPP Wonokerto dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)
33	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	anggaran untuk pembangunan dan perawatan terbatas	Risiko Operasional	fasilitas pelabuhan perlu direhab dan dikembangkan	penyewa dan pembeli ikan kurang nyaman	nelayan dan pelaku usaha
34	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Pelayanan tambat labuh tidak dapat dilaksanakan	Risiko Operasional	Sedimentasi di sepanjang dermaga	Fasilitas plabuhan perikanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal	Nelayan, PPP Tawang
35	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Fasilitas Pelabuhan Perikanan tidak berfungsi optimal	Risiko Reputasi	Penerapan kebijakan prioritas	Pelayanan kepelabuhanan terganggu	Nelayan, pengguna jasa
36	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Adanya fasilitas rusak di Pelabuhan Perikanan yang belum mendapatkan perbaikan	Risiko Operasional	Belum dilaksanakannya pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan sarana dan Prasarana, dan Dokumen) dari Pemkab Pati ke Pemprov Jawa Tengah	Mengganggu aktivitas perikanan tangkap di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo	PPP Bajomulyo, DKP Jateng, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Masyarakat
37	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Fasilitas pelabuhan perikanan tidak layak pakai	Risiko Operasional	Fasilitas sudah lama dan rusak	Aktifitas kapal perikanan di pelabuhan terganggu	Pelaku usaha perikanan tangkap
38	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Fasilitas pelabuhan banyak yang rusak dan tidak layak	Risiko Operasional	Kurangnya pemeliharaan dan faktor usia bangunan	Pelayanan pelabuhan terganggu	PPP Karimunjawa, DKP Jateng
39	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Perbaikan fasilitas terhambat	Risiko Fraud	Rekanan / penyedia barang kurang kompeten	Kualitas barang / fasilitas rendah	PPP Karimunjawa, DKP Jateng
40	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Perbaikan fasilitas terhambat	Risiko Kemitraan	Rekanan melanggar SPK yang ada	Hasil pekerjaan kurang berkualitas / penyelesaian pekerjaan terlambat	PPP Karimunjawa, DKP Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Kurangnya fasilitas pokok, penunjang, fungsional yang dimiliki pelabuhan	Risiko Operasional	Sarpras tidak memadai	Kegiatan operasional pelabuhan terhambat	PPP Lohgending, Nelayan
42	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Akses keluar dan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak dan sulit dilewati	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan	Penurunan jumlah pengunjung dan pelaku usaha di kawasan PPP Larangan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
43	Sasaran Kegiatan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Kolam pelabuhan dan alur pelayaran yang semakin dangkal dan sempit	Risiko Operasional	Keterbatasan Anggaran untuk perubahan pintu masuk dan perluasan kolam pelabuhan	Penurunan jumlah trip harian dan nilai produksi perikanan tangkap di PPP Larangan	Nelayan
44	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Pembudidaya tidak lagi melakukan kegiatan budidaya	Risiko Strategis	harga pakan ikan yang semakin mahal, cuaca ekstrim, benih ikan yang digunakan tidak unggul	produksi perikanan budidaya menuruh	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
45	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Tidak tercapainya produksi perikanan budidaya	Risiko Strategis	Produksi perikanan budidaya tidak terdata	Data produksi perikanan budidaya tidak valid	Pemerintah, Masyarakat, Pembudidaya
46	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jenis Pembinaan Yang Dilaksanakan	Materi pelatihan peningkatan keterampilan tidak diserap oleh pembudiaya	Risiko Operasional	Sosialisasi dan pelatihan hanya berupa materi tanpa adanya praktek	Pembudidaya tidak meningkat ketrampilannya	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
47	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya ikan yang difasilitasi sarana dan prasarana					
48	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jenis teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Pembudidaya tidak menerapkan teknologi budidaya secara berkelanjutan	Risiko Operasional	Pembudidaya belum menguasai teknologi budidaya yang diterapkan	Bantuan yang diberikan mangkrak dan tidak dimanfaatkan kembali	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
49	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jenis teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Dana hibah tidak dibelanjakan oleh kelompok penerima	Risiko Fraud	Adanya tindkan manipulatif/ penggelapan dana oleh kelompok penerima hibah	Kerugian aset negara/ pemerintah	Pemerintah, Masyarakat
50	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	Wabah penyakit ikan tertentu tidak tertangani	Risiko Operasional	Kompetensi dan fasilitas pengujian belum ada	Sebaran Hama dan Penyakit Ikan semakin meluas	BLPKIL dan Pelaku Usaha
51	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	Jumlah sampel yang diujikan di BLPKIL menurun	Risiko Operasional	Informasi kepada masyarakat/pembudidaya mengenai pelayanan pengujian di BLPKIL tidak tersampaikan	Para Pembudidaya ikan tidak pernah mengujikan air budidaya dan ikan yang terkena penyakit	BLPKIL
52	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	Media/reagen dan peralatan di laboratorium tidak tersedia, rusak dan kadaluarsa	Risiko Operasional	Penambahan Ruang Lingkup disetiap laboratorium membutuhkan support peralatan dan media reagen	Parameter pengujian tertentu tidak dapat diujikan dan tidak tersertifikasi	BLPKIL dan Pelanggan
53	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah unit pembudidaya ikan yang tertangani terkait kesehatan ikan dan lingkungannya	Hama Penyakit Ikan di lingkungan budidaya tidak terkendali	Risiko Operasional	Monitoring dan pengendalian HPI tidak dilakukan diseluruh pembudidaya di Jawa Tengah	Produksi ikan budidaya menurun	BLPKIL dan Pelaku usaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah unit pembudidaya ikan yang tertangani terkait kesehatan ikan dan lingkungannya	Terjadinya Resistensi Antimikorba dan obat ikan yang tidak terdaftar	Risiko Operasional	Penggunaan obat ikan yang tidak bijak sehingga pembudidaya menggunakan Antimikroba dan obat ikan yang tidak sesuai PermenKP No. 1 Tahun 2019	Terjadinya resistensi antimikroba karena penggunaan obat ikan yang tidak bijak dan obat ikan yang tidak terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan PerMen-KP No.1 Tahun 2019	Pelaku usaha
55	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah unit pembudidaya ikan yang tertangani terkait kesehatan ikan dan lingkungannya	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan ditingkat pembudidaya tidak terkendali	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak memahami upaya pencegahan dan pengendalian hama penyakit ikan	Terjadinya kematian ikan dan kerugian usaha budidaya ikan akibat hama penyakit ikan	Pelaku usaha
56	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase produksi ikan konsumsi air laut	adanya kerusakan pada rumah jaga di karamba jaring apung	Risiko Operasional	terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
57	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Bak pembenihan tidak dapat digunakan	Risiko Operasional	Bak pembenihan retak/bocor/rusak	Target produksi tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
58	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Adanya kerusakan pada rumah jaga di karamba jaring apung	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
59	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Dara	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Kolam bocor/retak/rusak	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan endemik tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
60	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Dara	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	Risiko Operasional	Adanya kebocoran pada kolam budidaya	target produksi tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
61	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Dara	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	Risiko Operasional	Adanya kerusakan pada kolam pendederan dan pemijahan	target produksi benih tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
62	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Dara	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Debit air yang masuk ke kolam berkurang	Risiko Operasional	Adanya kerusakan pada saluran air	target produksi induk bermutu tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
63	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Dara	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	Risiko Operasional	adanya kebocoran pada kolam budidaya	target produksi ikan konsumsi tidak tercapai	pemerintah dan stakehoolder
64	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Dara	Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Bak pembenihan bocor/retak/rusak	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas budidaya benih yang kurang memadai	target produksi benih unggul tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder
65	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya konsumsi ikan	Risiko Operasional	Rendahnya konsumsi ikan masyarakat	kekurangan gizi pada masyarakat	Masyarakat
66	Sasaran Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produk Olahan Ikan					
67	Sasaran Kegiatan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah SDM dan Pelaku Usaha yang Difasilitasi Kegiatan	Dana hibah yang diberikan tidak dibelanjakan oleh kelompok penerima	Risiko Fraud	Ada tindakan manipulatif/pengelapan dana oleh kelompok penerima	Kerugian aset negara/pemerintah	Pemerintah, Pelaku usaha perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
68	Sasaran Kegiatan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah SDM dan Pelaku Usaha yang Difasilitasi Kegiatan	Pelatihan peningkatan keterampilan tidak menyeluruh	Risiko Operasional	Kurangnya jenis pelatihan peningkatan keterampilan yang diselenggarakan	Produk Perikanan tidak variatif dan inovatif	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
69	Sasaran Kegiatan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah SDM dan Pelaku Usaha yang Difasilitasi Kegiatan	Pelaku usaha pengolahan tidak dapat dipromosikan	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak memenuhi kriteria untuk dipromosikan produknya	Produk perikanan tidak dapat menjangkau pasar yang luas	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
70	Sasaran Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kegiatan kontinuitas bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan; dan distrbusi produk perikana	Tidak ada informasi kebutuhan bahan baku maupun stok ikan	Risiko Operasional	Tidak ada data distribusi ikan	Rantai pasok perikanan tidak efektif	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
71	Sasaran Program	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	Penurunan jumlah dokumen kelayakan yang diterbitkan mencakup Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertiikat Hasil Analisis (Certificate Analysis Test) hasil perikanan	Risiko Strategis	Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau pelaku usaha hasil perikanan belum memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar, dan belum mampu menghasilkan produk olahan hasil perikanan yang berkualitas sesuai standar	Menurunnya daya saing produk hasil perikanan Provinsi Jawa Tengah serta belum dapat memenuhi tuntutan pasar akan produk hasil perikanan yang berkualitas	Pelaku usaha perikanan, UPI, masyarakat umum
72	Sasaran Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Pengolahan Ikan Yang difasilitasi kelayakan mutunya	UPI tidak terlayani pelayanan pembinaan SKP	Risiko Operasional	keterbatasan alokasi anggaran yang disediakan untuk BPMHP	tidak semua UPI dapat dibina jaminan keamanan pangan produk perikanan di Jawa Tengah dengan optimal	masyarakat, pelaku usaha perikanan
73	Sasaran Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Pengolahan Ikan Yang difasilitasi kelayakan mutunya	pelaku usaha enggan dan tidak tertarik mendapatkan sertifikasi SNI	Risiko Operasional	Kurangnya sosialisasi mengenai kebermanfaatan penerapan SNI produk	Daya saing produk perikanan di Jawa Tengah kurang	Pelaku Usaha perikanan
74	Sasaran Kegiatan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan	Target penerbitan Certifikat Analysis Test tidak terpenuhi	Risiko Operasional	Tidak mampu memenuhi tuntutan kebutuhan parameter pengujian yang semakin meningkat sesuai tuntutan pasar global	Target penerimaan PAD tidak tercapai	Pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha perikanan
75	Sasaran Kegiatan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan	peralatan pengujian tidak bisa beropoerasi dengan laik	Risiko Operasional	peralatan pengujian sudah berumur diatas 10 tahun dan keterbatasan anggaran	durasi pengujian menjadi lebih lama, bahkan ada parameter pengujian yang terhenti	masyarakat, pelaku usaha perikanan
76	Sasaran Kegiatan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan	Ketersediaan media dan reagen pengujian yang tidak mencukupi untuk melakukan pekerjaan pengujian	Risiko Operasional	peraturan pemerintah mewajibkan TKDN min 40% sedangkan produk media dan reagen lokal (non impor) masih terbatas	Kegiatan pengujian terhambat	Masyarakat
77	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Tingkat pelanggaran sangat tinggi	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak memahami Peraturan perundang - undang	Pemerintah rugi, kegiatan usaha terganggu	Pelaku usaha, Masyarakat dan pemerintah
78	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan	Tingkat pelanggaran tinggi	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak memahami undang - undang	Pemerintah rugi, kegiatan usaha terganggu	Pelaku usaha dan pemerintah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
79		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha pergaraman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan	Pelaku usaha tidak mengetahui peraturan perundang-undangan	Risiko Operasional	Usaha tidak sesuai peraturan perundang-undangan	Pelanggaran peraturan perundang-undangan	Nelayan, Masyarakat
80		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya	Tingkat pelanggaran tinggi	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak memahami undang - undang	Pemerintah rugi, kegiatan usaha terganggu	Pelaku usaha dan pemerintah
81		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Pelaku usaha tidak mengetahui peraturan perundang-undangan	Risiko Operasional	Usaha tidak sesuai peraturan perundang-undangan	Pelanggaran peraturan perundang-undangan	Nelayan, Masyarakat
82		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Rendahnya periode operasi pengawasan sektor KP	Risiko Operasional	Kurangnya operasi pengawasan Sektor KP	Pelaku usaha melanggar peraturan perundang undangan	Pemerintah, Nelayan, Masyarakat
83			Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Tingkat pelanggaran sangat tinggi	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak memahami Peraturan perundang - undang	Pemerintah rugi, kegiatan usaha terganggu	Pelaku usaha, Masyarakat dan pemerintah
84	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan					
85	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Keselamatan Petugas Pengawasan,	Risiko Operasional	Mesin kapal rusak saat di laut, kecelakaan saat di laut	Kondisi kapal tidak terawat, cuaca buruk, kurang keahlian personil ABK	OPD
86	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Intensitas patroli pengawasan yang rendah	Risiko Operasional	Tidak terawasinya WPPNRI	Terjadinya peningkatan IUU Fishing	Masyarakat dan Lingkungan
87	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Tidak terawasinya WPPNRI 712 wilayah perairan pantai utara bagian timur dari kegiatan Unreported and Unregulated (IUU) Fishing	Risiko Operasional	1. Periode patroli pengawasan yang rendah 2. Kondisi kapal pengawas perikanan perlu untuk pemeliharaan dan perawatan (docking)	Kasus IUU meningkat	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lingkungan
88	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	Pemeriksaan tidak terselesaikan	Risiko Operasional	SDM petugas kurang memadai	Target kinerja tidak tercapai	OPD
89	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	Rendahnya intensitas patroli pengawasan SDKP dengan speedboat	Risiko Operasional	Rendahnya intensitas patroli pengawasan SDKP dengan speedboat	Banyak pelaku usaha dan kapal perikanan yang beroperasi tidak terperiksa	Masyarakat dan Lingkungan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
90	Sasaran Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Petugas pengawasan tidak kompeten	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman petugas terhadap peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang berlaku	Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan tidak tertangani	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku kepentingan/stakeholder dan Lingkungan
91	Sasaran Progam	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan					
92	Sasaran Progam	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Tidak ada penetapan kawasan konservasi hasil rezonasi Kawasan Konservasi Ujungnegoro oleh Menteri Kelautan dan Perikanan	Risiko Operasional	Hasil kajian rezonasi Kawasan Konservasi Ujungnegoro tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi	Penurunan kualitas dan habitat ekosistem pesisir Kawasan Konservasi Ujungnegoro	pemerintah daerah, nelayan, masyarakat pesisir, pelaku usaha perikanan kelautan
93	Sasaran Progam	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Hasil kajian rezonasi kawasan konservasi tidak sesuai dengan fakta di lapangan	Risiko Fraud	Hubungan pertemanan/kekerabatan dan atau pihak penyedia menginginkan pekerjaan tesebut	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai harapan	Pemerintah Daerah, Nelayan, Masyarakat Pesisir, dan Pelaku Usaha
94	Sasaran Progam	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Tidak tercapainya jumlah stakeholder yang memahami peraturan terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Risiko Operasional	Kurangnya keaktifan stakeholder untuk mengikuti sosialisasi peraturan terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Pemanfaatan ruang laut tidak sesuai dengan alokasi ruang RTRWP sehingga pengelolaan ruang laut tidak optimal	Pemerintah Daerah, Nelayan, Masyarakat Pesisir, dan Pelaku Usaha
95	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi garam	Tingginya curah hujan dan proses produksi tradisional	Risiko Operasional	Petambak garam tidak dapat berproduksi sepanjang tahun	Produktifitas petambak garam rendah	Masyarakat
96	Sasaran Progam	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	Potensi sentra garam rakyat tidak terdata	Risiko Operasional	Pendataan tidak lengkap	Data produksi garam tidak valid serta potensi pergaraman tak terdata	Sentra garam
97	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Masyarakat Pesisir Yang Mendapatkan Pelatihan, Pembinaan Serta Mendapatkan Bantuan Sarpras Usaha	Kelompok masyarakat pesisir tidak terbina	Risiko Operasional	Kelompok masyarakat pesisir kurang terampil dan kurang berkembang	Kelompok Masyarakat pesisir tidak sejahtera	Kelompok masyarakat pesisir
98	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang Menerapkan Teknologi Produksi Garam	KUGAR tidak terakses teknologi	Risiko Operasional	Produktifitas KUGAR rendah	Produksi dan kualitas garam rendah	Petambak garam
99	Sasaran Kegiatan			Adanya praktek gratifikasi dalam pengadaan Hibah Sarpras Garam	Risiko Fraud	Hubungan pertemanan/kekerabatan dan atau pihak penyedia menginginkan pekerjaan tesebut	Kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan	Penyedia
100	Sasaran Kegiatan			KUGAR tidak terbina	Risiko Operasional	Produktifitas KUGAR rendah	Produksi garam turun/rendah	Petambak garam

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran	Sasaran 2 Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman cukup tinggi dikarenakan lingkungan penanaman yang kotor, kriteria lokasi/sedimen kurang sesuai, pemeliharaan bibit tidak maksimal sebelum penanaman	Risiko Operasional	Musim saat penanaman yang tidak mendukung, lahan tidak cocok	Bibit Mangrove tidak tumbuh/mati, bibit hilang karena ombak	Masyarakat pesisir
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Penanaman Mangrove yang ditanam pada lokasi yang telah ditentukan mengalami kerusakan, kematian, atau hilang terkena ombak	Risiko Operasional	Kondisi cuaca dipesisir pantura yang extrem	Tingkat kelulus hidupan mangrove yang ditanam sangat rendah	Masyarakat pesisir
2		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Tidak terpenuhinya penilian EVIKA	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman pengelola dalam mengelola kawasan konservasi	Terjadi penurunan nilai EVIKA	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur
3		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Biota target di kawasan konservasi mengalami penurunan	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman masyrakat terkiat kawasan konservasi	Sumber Daya Ikan di sekitar Kawasan Konservasi berkurang	Masyarakat di sekitar kawasan konservasi
7	Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Personil OPD tidak mempunyai orientasi pelayanan	Risiko Reputasi	Pelayanan lambat	Buruknya tingkat pelayanan kepada masyarakat	Masyarakat
8	Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Kurang pemahaman identifikasi risiko	Risiko Reputasi	Kurangnya sosialisasi SPIP	Risiko tidak teridentifikasi	OPD
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Program/kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kurangnya pengendalian	Risiko Strategis	Rendahnya integritas ASN	Tidak tercapainya target program/kegiatan	Pemda, OPD dan masyarakat
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Capaian Kinerja Rendah	Risiko Operasional	Kapasitas SDM Kurang Memadai	Kinerja Perangkat Daerah Tidak Mencapai Target	PEMDA
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah.	Operasional kedinasan tidak terpenuhi dan tidak berjalan optimal sesuai dengan indikator kinerja.	PPP Tegalsari dan pelaku usaha Perikanan Tangkap
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Kekurangan SDM yang berkompeten dibidangnya, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah	Operasional kedinasan tidak terpenuhi dan tidak berjalan optimal sesuai dengan indikator kinerja.	PPP Asemdoyong

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah.	Operasional kedinasan tidak terpenuhi dan tidak berjalan optimal sesuai dengan indikator kinerja.	PPP Wonokerto dan pelaku usaha Perikanan Tangkap
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Target dan realisasi program kegiatan tercapai	Risiko Operasional	administrasi berjalan tertib dan lancar	Pelayanan tidak terganggu	pegawai dan stakeholder
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pengelolaan pelayanan publik belum dilaksanakan dengan baik	Risiko Operasional	Sumber Daya Manusia (SDM) belum terampil	Nilai indeks kepuasan masyarakat menurun	Pengguna jasa, PPP Tawang
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah tidak tercapai	Risiko Operasional	Keterbatasan SDM (PNS dan PPPK) yang ditugaskan di PPP Morodemak	Pelayanan eksternal (kepada masyarakat) dan pelayanan internal (kepegawaian, keuangan) kurang optimal	Pegawai PPP Morodemak dan Masyarakat Pengguna Jasa
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kurang tertatanya manajemen kepegawaian di PPP Bajomulyo	Risiko Operasional	Perangkapan jabatan Sub Koor Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dengan Plt Kasubbag TU dan terbatasnya jumlah staf sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum berjalan optimal	Keterlambatan pelaporan hasil evaluasi SKP dan keterlambatan penyusunan dokumen pengadaan pegawai non ASN pada tahun berikutnya	Pegawai ASN dan Non ASN PPP Bajomulyo, Sub Bag Umpeg DKP Jateng
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah yang tersedia rendah	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dan SDM	Operasional pelabuhan terganggu	PPP Tasikagung dan penerima layanan
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah	Operasional kedinasan tidak terpenuhi dan tidak berjalan optimal sesuai dengan indikator kinerja.	PPP Karimunjawa dan pelaku usaha Perikanan Tangkap
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pelayanan dan kinerja terhambat	Risiko Operasional	Pegawai tidak kompeten	kegiatan Operasional kedinasan tidak terpenuhi, nilai kepuasan msyarakat menurun	PPP Lohgending
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kegiatan pelayanan administasi tidak berjalan oprimal	Risiko Operasional	Terbatasnya perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan administrasi kantor	Kegiatan operasional kantor dan Pelayanan tidak optimal	PPP Lohgending
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Anggaran yang telah disusun tidak mencukupi untuk pembayaran tagihan langganan	Risiko Operasional	Adanya kenaikan tarif biaya langganan listrik/air/telepon/internet di tahun berjalan yang tidak dapat di prediksi	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi biaya tagihan langganan sehingga menyebabkan silpa dan tagihan langganan di akhir tahun dibayarkan oleh kantor induk	PPP Lohgending

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	Risiko Operasional	Barang Milik Daerah yang rusak tidak dapat diperbaiki	kegiatan pelayanan dan operasional kantor terhambat	PPP Lohgending
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kegiatan operasional tidak berjalan dengan baik	Risiko Operasional	SOP operasional tidak diterapkan	Ketidakpuasan pelanggan dan penurunan kinerja pegawai	BLPKIL dan Pelanggan
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	terdapat kebutuhan pegawai dan fasilitas yang kurang memenuhi standar untuk menunjang urusan pemerintahaan	kegiatan operasional kedinasan tidak terpenuhi dan tidak berjalan optimal sesuai dengan indikator kinerja	pemerintahan
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Terhambatnya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam peningkatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di PPP Larangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang tidak bisa dilaksanakan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Barat	Risiko Operasional	Pembagian pekerjaan kurang merata	Kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian terhambat	Pegawai CDK Barat
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Ketergantungan nahkoda dan ABK dari Instansi lain	Risiko Operasional	Tidak ada tenaga Nahkoda dan ABK kapal pengawasan CDK Wil Selatan	Kegiatan pengawasan terhambat	Tim Pengawasan
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Timur	Risiko Operasional	Belum terisinya Kepala Subbag TU pada CDK Timur	Kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian terhambat	Pegawai CDK Timur
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Wilayah Timur	Risiko Operasional	Pembagian pekerjaan kurang merata	Kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian terhambat	Pegawai CDK Wilayah Timur
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Penyediaan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah tidak dapat berjalan secara optimal	Risiko Strategis	Sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yang belum mencukupi	Turunnya tingkat kepuasan masyarakat serta kinerja organisasi tidak optimal	Masyarakat umum
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Lambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	Risiko Operasional	Tidak tersediannya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	Pelaksanaan program tidak terencana dan tidak dievaluasi	OPD
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terlambatnya penyampaian data kepegawiaan	Risiko Fraud	Pegawai Tidak menyampaikan pembaharua data terkait kepegawaian	Pegawai menerima Kelebihan Gaji dan Tunjangan	Dinas
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlambatnya klaim asuransi barang milik daerah (gedung dan kendaraan)	Risiko Operasional	Lamanya administrasi pengajuan klaim	Terlambatnya pencairan klaim	OPD
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Pemahaman regulasi kepegawaian yang kurang	Risiko Operasional	Penyampaian informasi yang tidak merata	Keterlambatan penyampaian informasi kepegawaian yang terbaru	OPD
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tidak lengkapnya dokumen kepegawaian masing masing ASN	Risiko Operasional	Kesadaran ASN yang kurang dalam memenuhi dokumen kepegawaian	Keterlambatan pelayanan kepegawaian	OPD
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan BMD masih belum semua terakomodir TKDN	Risiko Strategis	Tidak semua merk luar ber TKDN	Sedikit pilihan dalam menentukan pengadaan BMD	OPD

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pagu dalam penyediaan jasa penunjang belum memadai	Risiko Strategis	Pagu dalam penyediaan jasa penunjang belum memadai	Tidak semua Barang milik daerah dapat dipelihara dengan baik	OPD
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan barang milik daerah tidak optimal	Risiko Operasional	Pagu anggaran tidak mencukupi dengan BMD yang ada	Tidak semua BMD dapat dipelihara dengan maksimal	OPD
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum daerah belum sesuai standar	Risiko Operasional	SDM kurang kompeten, anggaran terbatas	Kepuasan masyarakat terhadap layanan berkurang, banyak keluhan yang disampaikan	DKP, PPP Tegalsari, dan Masyarakat pengguna jasa
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Risiko Operasional	Pegawai kurang kompeten	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan terlaporkan	PPP Tegalsari
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	BMD dan kendaraan operasional mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dan kesulitan dalam penghapusan BMD	Pemanfaatan BMD kurang optimal.	PPP Tegalsari dan pengguna jasa kawasan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum daerah belum sesuai standar	Risiko Operasional	SDM kurang kompeten, anggaran terbatas	Kepuasan masyarakat terhadap layanan berkurang, banyak keluhan yang disampaikan	DKP, PPP Asemdoyong, dan Masyarakat pengguna jasa
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Risiko Operasional	Pegawai kurang kompeten	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan terlaporkan	PPP Asemdoyong
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	BMD dan kendaraan operasional mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dan kesulitan dalam penghapusan BMD	Pemanfaatan BMD kurang optimal.	PPP Asemdoyong dan pengguna jasa kawasan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum daerah tidak optimal dan sesuai standar layanan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dan SDM tidak kompeten	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menurun karena tidak sesuai dengan standar pelayanan	DKP Prov. Jateng, PPP Wonokerto, dan pengguna layanan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	Pegawai tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan terlaporkan	PPP Wonokerto
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, serta lambatnya proses penghapusan aset yang rusak	Aset dan Barang milik pemerintah yang sudah tidak bisa dipakai	PPP Wonokerto dan pengguna kawasan (pengguna aset)
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kegiatan operasional administrasi umum perkantoran belum maksimal	Risiko Operasional	keterlambatan ketersediaan anggaran	Pelayanan terganggu	pegawai dan stakeholder
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Risiko Operasional	keterlambatan ketersediaan anggaran	Pelayanan terganggu	pegawai dan stakeholder

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	kondisi kendaraan dinas dan asset milik daerah tidak dapat berfungsi dengan baik karena kurangnya pemeliharaan	Risiko Operasional	anggaran untuk pemeliharaan asset milik daerah terbatas	Pelayanan terganggu ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugas	pegawai dan stakeholder
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pengelolaan admninistrasi umum PD tidak sesuai standar layanan	Risiko Operasional	Anggaran dalam penyediaan peralatan perkantoran terbatas	Pelaksanaan pekerjaan belum berjalan dengan baik	Mayarakat, PPP Tawang
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat dokumen pendukung laporan penyediaan jasa penunjang PD yang hilang	Risiko Operasional	Pengelolaan arsip tidak disusun dengan baik	Tata kelola pengarsipan tidak terorganisir	PPP Tawang
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang milik daerah tidak dapat dipergunakan	Risiko Operasional	Anggaran pemeliharaan barang milik daerah terbatas	Barang milik daerah mengalami kerusakan yang parah	PPP Tawang
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar Layanan tidak tercapai	Risiko Operasional	Pelaksanaan kegiatan belum sesuai SOP yang sudah ditetapkan	Waktu pelayanan kepada pengguna jasa menjadi lebih lama (tidak sesuai standar layanan)	Masyarakat Pengguna Jasa
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun tidak tersusun	Risiko Operasional	Data dukung tidak lengkap	Penyediaan Jasa Penunjang tidak optimal	PPP Morodemak
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal	Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak berfungsi baik	Risiko Operasional	Rendahnya integritas pegawai	Operasional kegiatan kantor tidak berjalan lancar	PPP Morodemak, Masyarakat Pengguna Jasa
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Adanya Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan	Risiko Operasional	Dinamika kondisi usaha perikanan tangkap dan peraturan perundangundangan yang berlaku	Kurang efisiennya waktu pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan	PPP Bajomulyo, Masyarakat penerima layanan dan DKP Jateng
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kebutuhan jasa air PDAM dan listrik PLN yang tidak sesuai alokasi anggaran	Risiko Operasional	Fluktuasi kebutuhan karena fluktuasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu	Deviasi negatif pada realisasi keuangan bulanan dan potensi kekurangan anggaran pada akhir tahun	PPP Bajomulyo
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terjadinya kerusakan barang milik daerah yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi	Risiko Operasional	Tingkat kerusakan barang milik daerah yang terlalu parah	Barang milik daerah tidak dapat dipergunakan untuk keperluan kantor	PPP Bajomulyo
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan administrasi tidak sesuai standar	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran	Operasional pelabuhan terganggu	PPP Tasikagung
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	SDM kurang kompeten	Kinerja PPP tidak dapat dinilai	PPP Tasikagung

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Tidak ada barang milik daerah yang terpelihara	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pencatatan dan pengecekan kondisi barang milik daerah	Barang milik daerah tidak berfungsi dengan baik	PPP Tasikagung, Penerima layanan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan/pengadaan barang/jasa milik daerah tidak melalui sistem pengadaan yang benar	Risiko Kemitraan	Hubungan pribadi antara KPA/PPTK dengan penyedia barang/jasa	Barang/jasa yang tersedia tidak sesuai spesifikasi yang diharapkan	PPP Tasikagung
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum daerah tidak optimal dan sesuai standar layanan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dan SDM tidak kompeten	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menurun karena tidak sesuai dengan standar pelayanan	DKP Prov. Jateng, PPP Karimunjawa, dan pengguna layanan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	Pegawai tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan terlaporkan	PPP Karimunjawa
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, serta lambatnya proses penghapusan aset yang rusak	Aset dan Barang milik pemerintah yang sudah tidak bisa dipakai	PPP Karimunjawa dan pengguna kawasan (pengguna aset)
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pegawai kurang kompeten	Risiko Operasional	Terbatasnya jumlah SDM	Kegiatan peayanan tidak optimal	PPP Lohgending
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pembayaran tagihan langganan listrik/air/telepon/internet tidak terpenuhi	Risiko Operasional	Adanya kenaikan tarif biaya langganan listrik/air/telepon/internet di tahun berjalan yang tidak dapat di prediksi	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi biaya tagihan langganan sehingga menyebabkan silpa dan tagihan langganan di akhir tahun dibayarkan oleh kantor induk	PPP Lohgending
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	Risiko Operasional	Barang milik daerah yang rusak tidak dapat diperbaiki	Kegiatan pelayanan dan operasional kantor terhambat	PPP Lohgending
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Terhambatnya aktivitas perkantoran	Risiko Operasional	Sarana prasarana perkantoran tidak memadai	Kegiatan administrasi perkantoran tidak berjalan optimal	BLPKIL dan Pelanggan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kegiatan pelayanan BLPKIL terhambat	Risiko Operasional	Pelayanan tidak sesuai standar	Ketidakpuasan pelanggan	BLPKIL dan Pelanggan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Ketidakpuasan pelanggan dan terganggunya aktivitas pelayanan BLPKIL	Risiko Operasional	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Kondisi barang dan peralatan kantor penunjang pelayanan rusak	BLPKIL dan Pelanggan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum daerah belum sesuai standar	Risiko Operasional	SDM kurang terpenuhi, anggaran terbatas	Kepuasan masyarakat terhadap layanan disampaikan	Pemerintahan dan Masayarakat Pengguna layanan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	SDM kurang memadai, anggaran terbatas	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan terlaporkan	pemerintahan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pemanfaatan BMD kurang optimal	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran serta kesulitan dalam pengusulan dan penghapusan BMD	Pemanfaatan BMD kurang optimal	pemerintahan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Terhambatnya kegiatan operasional perkantoran di PPP Larangan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam penyediaan peralatan operasional perkantoran	Kegiatan operasional perkantoran di PPP Larangan yang tidak bisa dilaksanakan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat tambahan biaya pengeluaran rutin diluar anggaran yang sudah ditetapkan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan RAB yang sudah disusun	PPP Larangan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang semakin rusak	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah	Aset dan Barang milik pemerintah yang sudah tidak bisa digunakan lagi	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	kegiatan rehabilitasi kantor secara terukur	Risiko Operasional	kondisi kantor yang dikelilingi tambak warga dibibir pantai yang dapat lebih cepat merusak bangunan kantor	jumlah anggaran rehabilitasi yang sangat terbatas	pegawai cabang dinas kelautan wilayah barat dan masyarakat pemilik tambak sekitar kantor cdkwb
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak terpenuhi pembayaran tarif listrik dalam 1 tahun	Risiko Operasional	Peningkatan penggunaan sumberdaya listrik tidak disesuaikan dengan anggaran	Jumlah anggaran tidak memenuhi tagihan sehingga menimbulkan silpa dan tagihan dibayar DKP	Pegawai CDK Wilayah Barat
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kerusakan barang inventaris kantor	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran pemeliharaan barang yang ada	Pemeliharaan tidak terlaksana, pelayanan terhambat	Pegawai CDK Wilayah Barat
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Harga barang di GO lebih tinggi dari RAB sehingga tidak dapat melakukan transaksi	Risiko Operasional	Tidak dapat transaksi pembelian barang lewat GO	Kegiatan layanan Administrasi terhambat	Seluruh pegawai CDK Selatan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	Risiko Operasional	Kenaikan tarif listrik yang tidak bisa diprediksi	Tidak dapat dilakukan pembayaran listrik	Seluruh Pegawai CDK Wilayah Selatan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang yang rusak tidak dapat segera diperbaiki	Risiko Operasional	Anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan barang	Kegiatan pelayanan terhambat	Seluruh Pegawai Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tidak terpenuhinya pembelanjaan Barang sesuai RAB	Risiko Operasional	Kenaikan harga barang	Kegiatan layanan Administrasi terhambat	Staf CDK Timur
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	Risiko Operasional	Kenaikan tarif listrik yang tidak bisa diprediksi	Tidak dapat dilakukan pembayaran listrik	Seluruh pegawai CDK Timur
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang yang rusak tidak dapat segera diperbaiki	Risiko Operasional	Anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan barang	Kegiatan pelayanan terhambat	Seluruh pegawai CDK Timur
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	sarana dan prasarana pelayanan kantor tidak terawat dengan baik	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kantor	Menurunnya kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat	Masyarakat
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terhambatnya kegiatan pelayanan akibat terhentinya suplai air dan listrik untuk kegiatan operasional	Risiko Operasional	Permasalahan pada suplai listrik dan air dari penyedia jasa	Menurunnya kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kurang optimalnya kegiatan operasional kantor dan pelayanan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas kantor (gedung, peralatan pelayanan)	Kegiatan pelayanan terhambat	Masyarakat

Tabel
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Menurunnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	4	4	16	Ada	Pembuatan TKB, pengawasan penggunaan alat tangkap, monitoring hama penyakit ikan dan hibah/bantuan kepada nelayan dan pembudidaya ikan	Memadai	3	3	9
Tingginya curah hujan dan proses produksi tradisional	4	4	16	Ada	Penggunaan teknologi dalam produksi garam dan bantuan/hibah kepada petambak garam	Memadai	3	3	9
Masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya konsumsi ikan	3	4	12	Ada	Kampanye gemar makan ikan di masyarakat	Memadai	3	2	6
Penurunan SDI dan cuaca buruk	3	4	12	Ada	Pembuatan TKB, pengawasan penggunaan alat tangkap dan hibah/bantuan kepada nelayan	Memadai	3	3	9
Terjadinya serangan hama penyakit ikan, cuaca buruk dan tingginya biaya produksi	3	4	12	Ada	Monitoring hama penyakit ikan dan bantuan/hibah kepada pembudidaya ikan	Memadai	2	3	6
Masih adanya IUU dan kegiatan masyarakat yang merusak SDKP	4	4	16	Ada	Sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatkan operasi pengawasan SDKP	Memadai	3	2	6
Personil OPD tidak mempunyai orientasi pelayanan	3	3	9	Ada	Rapat evaluasi dan pengendalian kegiatan setiap bulan	Memadai	2	2	4
Kurang pemahaman identifikasi risiko	3	3	9	Ada	Pertemuan dan pembinaan SPIP setiap tahun, penilaian maturitas SPIP	Memadai	2	3	6
Program/kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kurangnya pengendalian	3	4	12	Ada	Rapat koordinasi pengendalian operasional program/kegiatan secara rutin tiap bulan	Memadai	2	2	4
Capaian Kinerja Rendah	2	2	4	Ada	Peningkatan Kapasitas SDM Yang Memadai	Memadai	1	1	1
Jumlah ikan hasil tangkapan di laut jawa menurun	3	5	15	Ada	Penenggelaman rumah ikan, sosialisasi pengelolaan sdi yang lestari dan berkelanjutan dan pemberian bantuan alat tangkap ramah lingkungan	Belum Memadai	3	4	12
Nelayan kecil tidak mendapatkan jaminan perlindungan kecelakaan kerja saat melaksanakan kegiatan penangkapan ikan	3	3	9	Ada	memberikan bantuan asuransi nelayan bagi nelayan kecil	Memadai	3	2	6
Terjadinya penurunan kelestarian sumberdaya ikan	3	4	12	Ada	Deseminasi regulasi cara penangkapan ikan yang bertanggung jawab secara berkala	Memadai	0	0	0
Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah.	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2
Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pelayanan kepada masyarakat kawasan PPP Asemdoyong tidak berjalan dengan baik	4	3	12	Belum Ada	Memperbaiki Fasilitas Sarana Kebersihan (MCK) di Kawasan PPP Asemdoyong	Belum Memadai	2	2	4
Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Tidak Berjalan dengan Baik dan Nyaman	4	3	12	Ada	'Memperbaiki Sarana Pas masuk Kawasan PPP Asemdoyong	Belum Memadai	3	2	6
Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	'Diikutkan diklat pegawai, perbaikan sarana dan prasana yang menunjang dan dilakukan evaluasi secara periodik dengan staf meting.	Memadai	1	2	2
Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhan	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2
Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2
Peraturan Pemerintah yang terkait dengan kepelabuhanan dapat dilaksanakan dengan lancar	3	4	12	Ada	Meningkatkan sarana prasarana pelabuhan di PPP Klidang Lor	Memadai	2	2	4
Target dan realisasi program kegiatan tercapai	3	4	12	Ada	mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun depan	Memadai	3	3	9
Pengelolaan perikanan tangkap yang telah ditetapkan belum bisa dilaksanakan dengan baik	3	4	12	Ada	Pemeliharaan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan	Memadai	3	3	9
Pengelolaan pelayanan publik belum dilaksanakan dengan baik	3	3	9	Ada	Sumber Daya Manusia (SDM) mengikuti pengembangan kompetensi	Memadai	2	3	6
Pelayanan kepelabuhanan tidak tercapai	4	3	12	Ada	Pelatihan dan pemenuhan sarpras	Belum Memadai	3	2	6
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah tidak tercapai	2	2	4	Ada	Mengajukan usulan Analisis Beban Kerja untuk penambahan pegawai	Memadai	2	2	4
Jumlah Staf yang belum memenuhi kebutuhan di Analisis Beban Kerja (ABK)	3	3	9	Ada	Mengusulkan permohonan staf tambahan kepada Sekretaris DKP Jateng	Memadai	1	3	3
Kurang tertatanya manajemen kepegawaian di PPP Bajomulyo	3	3	9	Ada	Pendelegasian sebagian tugas Plt Kasubbag TU kepada staf untuk memastikan pelaksanaan evaluasi SKP triwulan dan tahunan serta pengadaan tenaga honorer untuk tahun berikutnya sesuai dengan jadwal	Memadai	1	3	3
Ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung rendah	3	4	12	Ada	- Pengembangan kompetensi ASN - Promosi peluang investasi	Belum Memadai	3	3	9
Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah yang tersedia rendah	2	4	8	Ada	- Melakukan perhitungan rencana anggaran secara cermat - Melakukan setiap kegiatan sesuai dengan rencana anggaran yang sudah disepakati	Memadai	1	2	2
Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhan	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2
Pelayanan Kepelabuhan tidak maksimal	4	4	16	Ada	Sosialisasi dan Pelatihan, Pembinaan personil	Memadai	4	4	16
Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan keamanan operasional pelabuhan tidak berjalan optimal	4	4	16	Ada	Sosialisasi, Pengadaan sapras (CCTV) di kawasan pelabuhan	Belum Memadai	4	4	16
Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan	4	4	16	Ada	Sosialisasi dan publikasi terkait fasilitas yang tersedia di pelabuhan	Belum Memadai	4	4	16
percepatan pengembangan pelabuhan terhambat	4	4	16	Ada	Koordinasi dengan instansi terkait (ATR/BPN, BBWS, BPKAD)	Belum Memadai	4	4	16
kurangnya fasilitas pokok, penunjang, fungsional yang dimiliki pelabuhan	4	4	16	Ada	perbaikan halaman ruang pertemuan SPI Pasir	Belum Memadai	4	4	16
nelayan belum terjamin oleh asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	4	4	16	Ada	Sosialisasi dan koordinasi terkait asuransi nelayan	Belum Memadai	4	4	16
SDM tidak kompeten dan kurang terampil	4	4	16	Ada	Menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat Fungsional maupun teknis serta Seminar guna meningkatkan kompetensi pegawai	Belum Memadai	4	4	16
Pelayanan dan kinerja terhambat	4	4	16	Ada	Pembagian tugas kepada pegawai sesuai kompetensinya sehingga semua kegiatan operasional dan pelayanan terpenuhi	Belum Memadai	4	4	16
Kegiatan pelayanan administasi tidak berjalan oprimal	2	2	4	Ada	pembagian tugas bagi pegawai secara merata	Belum Memadai	3	3	9
Anggaran yang telah disusun tidak mencukupi untuk pembayaran tagihan langganan	4	4	16	Ada	Penambahan anggaran tagihan langganan listrik/air/telepon/internet	Memadai	3	3	9
Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	4	4	16	Ada	penentuan skala prioritas pemeliharaan	Belum Memadai	4	3	12
Wabah penyakit ikan tertentu tidak tertangani	4	4	16	Ada	Menyusun rencana monitoring pengendalian penyakit ikan dan menyusun rencana penambahan ruang lingkup pengujian penyakit ikan berpotensi wabah	Memadai	3	4	12
Kegiatan operasional tidak berjalan dengan baik	4	4	16	Ada	Perencanaan penganggaran sesuai dengan kebutuhan	Memadai	3	4	12
adanya kerusakan pada rumah jaga di karamba jaring apung	3	5	15	Ada	perbaikan rumah jaga di karamba jaring apung	Memadai	2	5	10
Jumlah Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	3	2	6	Ada	Pengoptimalan kebutuhan pegawai dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan yang memadai	Memadai	2	2	4
Terhambatnya pelayanan kepelabuhanan yang diberikan kepada nelayan	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran terkait peningkatan sarana dan prasarana serta SDM di PPP Larangan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terhambatnya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran terkait peningkatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di PPP Larangan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	2	3	6
Tingkat pelanggaran sangat tinggi	4	3	12	Ada	kegiatan Sosialisasi peraturan Perundang - undang/Pemahaman Peraturan Perundangan	Memadai	3	2	6
Target produksi garam tidak tercapai	3	3	9	Ada	1. Menguatkan komitmen petambak dan petugas operator garam dalam melaporkan data produksi garam 2. Meningkatkan teknologi dan penggunaannya dalam produksi garam	Memadai	2	2	4
Tidak ada penetapan kawasan konservasi hasil rezonasi Kawasan Konservasi Ujungnegoro oleh Menteri Kelautan dan Perikanan	4	2	8	Ada	Melakukan kajian rezonasi Kawasan Konservasi Ujungnegoro secara detail, komprehensif, melibatkan tenaga ahli bidang konservasi, dan kelompok masyarakat pegiat konservasi	Memadai	2	1	2
Pembudidaya tidak lagi melakukan kegiatan budidaya	3	4	12	Ada	Memberikan bantuan kepada kelompok pembudidaya berupa benih dan pakan, memberikan pembinaan bagaimana budidaya ikan yang baik	Memadai	3	3	9
Tidak tercapainya produksi perikanan budidaya	4	3	12	Ada	Koordinasi dengan enumerator dan validator kabupaten/kota	Memadai	3	2	6
Pemgurangan jumlah produksi oleh pembudidaya	2	4	8	Ada	Menjembatani hubungan pembudidaya dan konsumen	Memadai	2	2	4
Tidak tercapainya produksi olahan ikan	4	3	12	Ada	Koordinasi dengan enumerator dan validator di tingkat Kabupaten/Kota	Memadai	3	2	6
Lokasi penanaman mangrove yang dilakukan belum sesuai dengan pembagian lokasi penanaman dari Bappeda Jateng	4	3	12	Ada	Memetakan potensi lahan untuk rehabilitasi hutan mangrove	Memadai	2	2	4
Meningkatnya pelanggaran kegiatan perikanan tangkap terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	4	3	12	Ada	Koordinasi dan Sosialisasi di Desa/ Dinas Kab/Kota terkait pentingnya pengurusan dokumen kapal	Memadai	3	1	3
Keselamatan Petugas Pengawasan,	4	3	12	Ada	Pelatihan/bimtek SOP terkait keselamatan kerja ABK selama pengawasan	Memadai	2	2	4
Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Barat	3	4	12	Ada	Pembagian pekerjaan sesuai dengan kompetensi staff	Memadai	1	3	3
Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	5	3	15	Ada	Survei lokasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, kelompok konservasi masyarakat setempat, dan penyuluh kehutanan	Belum Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terjadinya Peningkatan Kasus Pelanggaran	5	4	20	Ada	Sosialisasi dan edukasi terkait peraturan yang berlaku	Belum Memadai	3	4	12
Intensitas patroli pengawasan yang rendah	3	4	12	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan	Memadai	2	4	8
Intensitas patroli pengawasan yang rendah	3	4	12	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan	Memadai	2	4	8
Ketergantungan nahkoda dan ABK dari Instansi lain	4	4	16	Ada	Bekerjasama dengan PSDKP	Belum Memadai	4	4	16
Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	4	4	16	Ada	Melakukan groundcheck	Memadai	4	3	12
Pelaku usaha belum mengetahui peraturan terkait Perijinan Berusaha	3	4	12	Ada	- Melaksanakan penyadartahuan kepada pelaku usaha tentang peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang berlaku - Melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan terkait perijinan berusaha dan peraturan dan perundangan bidang kelautan dan Perikanan agar pelaku usaha bisa tertib - Bagi pelaku usaha yang tidak tertib diberikan sanksi administratif dan memfasilitassi/mendorong pelengkapan secara administrasi perijinan berusaha sesuai dengan peraturan dan	Memadai	3	3	9
Pelaku usaha/Nelayan tidak memiliki dokumen perizinan yang lengkap	4	4	16	Ada	Sosialisasi dan Clinic Perizinan	Memadai	3	3	9
Tidak terawasinya WPPNRI 712 wilayah perairan pantai utara bagian timur dari kegiatan Unreported and Unregulated (IUU) Fishing	3	3	9	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan di wilayah perairan sampai 12 mil Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas perikanan rutin/berkala merawat kapal pengawas perikanan yang telah usia dari pengadaan awalnya	Memadai	3	3	9
Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Timur	3	4	12	Ada	Penunjukan Kepala Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan sebagai pelaksana tugas	Memadai	3	3	9
Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Wilayah Timur	3	3	9	Ada	Pembagian pekerjaan sesuai dengan kompetensi staff	Memadai	1	3	3
Penurunan jumlah dokumen kelayakan yang diterbitkan mencakup Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertiikat Hasil Analisis (Certificate Analysis Test) hasil perikanan	3	4	12	Ada	Melakukan pembinaan pada UPI dan pelaku usaha perikanan hingga agar mampu memenuhi standar serta memberikan pelayanan dalam pengujian mutu hasil perikanan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk hasil perikanan yang dihasilkan	Memadai	2	3	6
Penyediaan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah tidak dapat berjalan secara optimal	3	3	9	Ada	Mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia secara optimal sesuai dengan kebutuhan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	2	4	8	Ada	Penyusunan RKPD dan Rakor POK	Memadai	1	2	2
Terlambatnya penyampaian data kepegawiaan	2	3	6	Ada	Pengecekan secara berkala antara data kepegawaian dan data gaji	Memadai	1	2	2
Terlambatnya klaim asuransi barang milik daerah (gedung dan kendaraan)	2	4	8	Ada	Memilih asuransi yang terpercaya	Memadai	1	2	2
Pemahaman regulasi kepegawaian yang kurang	2	4	8	Ada	Mendatangkan narasumber untuk memberikan pemahaman tentang regulasi kepegawaian	Memadai	1	2	2
Tidak lengkapnya dokumen kepegawaian masing masing ASN	2	4	8	Ada	Menyampaikan daftar nominatif ASN yang belum melengkapi dokumen kepegawaian	Memadai	1	2	2
Pengadaan BMD masih belum semua terakomodir TKDN	2	4	8	Ada	Menaikkan pagu anggaran dalam pengadaan BMD	Memadai	1	2	2
Pagu dalam penyediaan jasa penunjang belum memadai	2	4	8	Ada	Memaksimalkan pagu anggaran yang telah ditetapkan	Belum Memadai	1	2	2
Pemeliharaan barang milik daerah tidak optimal	2	4	8	Ada	Memaksimalkan pagu anggaran yang telah ditetapkan	Memadai	1	2	2
Nelayan kecil tidak mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan	3	3	9	Ada	melakukan sosialisasi dan memfasilitasi nelayan kecil dengan melibatkan penyuluh perikanan di kabupaten kota untuk mendapat kartu identitas nelayan	Memadai	2	3	6
Pemberian gratifikasi pada pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa	5	5	25	Ada	PPK menunjuk tim teknis sebagai pendamping dari instansi teknis terkait dan akademisi yang mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan pelabuhan dan melibatkan inspektorat provinsi jawa tengah dalam tahap pelaksanaan kegiatan serta menerapkan nilai-dasar ASN BerAKHLAK terutama pada nilai Akuntabel dan kolaboratif	Memadai	4	4	16
Jumlah ikan yang didaratkan tidak terlaporkan sesuai dengan kondisi di lapangan	3	4	12	Ada	Pengumpulan data statistik perikanan tangkap melibatkan petugas/operator di masing2 kabupaten/kota dan dilakukan validasi data tiap semester sehingga setiap data produksi dan nilai produksi telah dilakukan filter dan validasi, dimulai dari petugas dilapangan, operator dan petugas Validator di masing-masing kabupaten/kota, kemudian dilakukan validasi pada tingkat provinsi serta rekrutmen enumerator pendataan produksi perikanan tangkap yang dilakukan oleh KKP	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ketertiban nelayan yang rendah dalam melengkapi dokumen kapal perikanan sesuai aturan yang berlaku dan memberikan gratifikasi untuk dibantu dipercepat dokumen perizinannya	5	5	25	Ada	'Melakukan Sosialisasi dan Gerai Pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan Pengawasan kelengkapan dokumen kapal perikanan serta menerapkan nilai-dasar ASN BerAKHLAK terutama pada nilai Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel	Memadai	0	0	0
Nelayan tidak dapat melakukan penangkapan ikan secara efektif dan efisien	3	3	9	Ada	'1. Memberikan bantuan Teknologi Penangkapan Ikan sangat bermanfaat dan berguna bagi nelayan, serta dapat memudahkan nelayan dalam melakukan tangkap ikan di perairan; 2. Sosialisasi dan melakukan pendampingan dalam mengaplikasikan teknologi tersebut kepada nelayan	Memadai	0	0	0
Nelayan/awak kapal perikanan tidak dapat bekerja sesuai dengan prosedur diatas kapal	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan Pelatihan melalui paguyuban nelayan, HNSI, KNTI dan Penyuluh Perikanan	Memadai	0	0	0
Terjadinya penurunan stok sumberdaya ikan dan kerusakan lingkungan	3	3	9	Ada	'Sosialisasi melalui paguyuban nelayan, HNSI, KNTI dan Penyuluh Perikanan	Memadai	0	0	0
Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	3	3	9	Ada	Sosialisasi bersama dengan instansi terkait dan stakeholder terkait peraturan perundang-undangan, dan pendampingan kepada nelayan oleh instansi terkait.	Memadai	2	3	6
Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	5	5	25	Ada	Sosialisasi bersama dengan instansi terkait dan stakeholder terkait peraturan perundang-undangan, dan pendampingan kepada nelayan oleh instansi terkait	Memadai	3	3	9
Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	3	3	9	Ada	Pemenuhan data dukung yang akurat sebagai bahan penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan dan penyesuaian dengan kondisi Pelabuhan eksiting yang sekarang, pembentukan tim penyusun dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan, koordinasi dengan pemerintah pusat (KKP) selaku koordinator penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan.	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Fasilitas Pelabuhan Perikanan banyak mengalami kerusakan (sedang dan parah)	3	4	12	Ada	Memasukan program pengembangan kawasan PPP Tegalsari sebagai program prioritas baik di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat	Memadai	3	3	9
Pemilihan/penunjukan penyedia jasa oleh Tim Pokja PBJ yang tidak kompeten	2	5	10	Ada	Melakukan pendampingan dan pengawasan dengan menggandeng Tim Pengawasan Eksternal (contoh: TP4D) mulai proses pemilihan penyedia jasa sampai pekerjaan selesai	Memadai	1	5	5
Melakukan pendampingan dan pengawasan dengan menggandeng Tim Pengawasan Eksternal (contoh: TP4D) mulai proses pemilihan penyedia jasa sampai pekerjaan selesai	3	3	9	Ada	Sosialiasi dan pendampingan kepada pemilik kapal dan nelayan oleh instansi terkait	Memadai	2	3	6
SDM yang kurang kompeten dan terampil	2	3	6	Ada	Koordinasi dengan instansi terkait tentang informasi pelatihan kompetensi, pengajuan anggaran dan usulan pelatihan SDM	Memadai	2	2	4
Pelayanan administrasi umum daerah belum sesuai standar	2	3	6	Ada	Mengusulkan anggaran kegiatan, pelatihan pegawai dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1	2	2	Ada	Pelatihan pegawai sesuai tupoksinya, monitoring dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	1	1	1
BMD dan kendaraan operasional mengalami kerusakan	2	4	8	Ada	Mengajukan jumlah anggaran yang optimal, perawatan kendaraan dinas secara rutin	Memadai	2	3	6
Tidak ada nya petugas syahbandar yang menetap di PPP Asemdoyong	3	4	12	Belum Ada	Mengusulkan petugas syahbandar di PPP Asemdoyong dari Internal DKP / Asemdoyong	Belum Memadai	2	3	6
Fasilitas pelabuhan kurang memadai dan banyak yang mengalami penurunan fungsi	3	4	12	Ada	Monitoring terhadap kegiatan pendaratan ikan, mengusulkan kegiatan pengerukan di alur sungai elon.	Memadai	3	3	9
Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	3	3	9	Ada	Pemenuhan data dukung yang akurat sebagai bahan penyusunan dokumen pengembanga Pelabuhan Perikanan dan penyesuain dengan kondisi Pelabuhan eksiting,	Memadai	2	3	6
Pelayanan kepada masyarakat kawsan PPP Asemdoyong tidak berjalan dengan baik	4	3	12	Ada	Memperbaiki Fasilitas Sarana Kebersihan (MCK) di Kawasan PPP Asemdoyong	Memadai	2	2	4
Pelaku usaha tidak memiliki sumber air bersih yang cukup	4	4	16	Ada	Pembuatan Sumur Bor Sederhana di Sekitar Kawasan Usaha	Memadai	2	2	4
Fasilitas pelabuhan kurang memadai dan banyak yang mengalami penurunan fungsi	3	4	12	Ada	Monitoring terhadap kegiatan pendaratan ikan, mengusulkan kegiatan pengerukan di alur sungai elon.	Memadai	3	3	9
Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi	3	3	9	Ada	'Sosialiasi dan pendampingan kepada nelayan dan pemilik kapal	Memadai	2	3	6
ABK tidak terlindungi hak nya dalam pemenuhan pendapatan dan jaminan kerja	4	3	12	Ada	Membuat PKL antara ABK dan Pemilik kapal, Pembinaan kepada nelayan dan ABK	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pelayanan pada masyarakat tidak optimal	4	3	12	Ada	Upaya Perbaikan Papan Nama Kantor dengan Lebih Baik dan Informatif	Memadai	2	2	4
SDM yang kurang kompeten dan terampil	2	3	6	Ada	Usulan pelatihan diklat, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan pelayanan	Memadai	2	2	4
Pelayanan administrasi umum daerah belum sesuai standar	2	3	6	Ada	Mengusulkan anggaran kegiatan, pelatihan pegawai dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1	2	2	Ada	Pelatihan pegawai sesuai tupoksinya, monitoring dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	1	1	1
BMD dan kendaraan operasional mengalami kerusakan	2	4	8	Ada	Mengajukan jumlah anggaran yang optimal, perawatan kendaraan dinas secara rutin	Memadai	2	3	6
Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	3	3	9	Ada	Sosialisasi bersama dengan instansi terkait dan stakeholder terkait peraturan perundang-undangan, dan pendampingan kepada nelayan oleh instansi terkait.	Memadai	2	3	6
Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	3	3	9	Ada	Pemenuhan data dukung yang akurat sebagai bahan penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan dan penyesuaian dengan kondisi Pelabuhan eksiting yang sekarang, pembentukan tim penyusun dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan, koordinasi dengan pemerintah pusat (KKP) selaku koordinator penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan.	Memadai	2	3	6
Fasilitas Pelabuhan Perikanan banyak mengalami kerusakan (sedang dan parah)	3	4	12	Ada	Memasukan program pengembangan kawasan PPP Wonokerto sebagai program prioritas baik di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat	Memadai	3	3	9
Pemilihan/penunjukan penyedia jasa oleh Tim Pokja PBJ yang tidak kompeten	2	5	10	Ada	Melakukan pendampingan dan pengawasan dengan menggandeng Tim Pengawasan Eksternal (contoh: TP4D) mulai proses pemilihan penyedia jasa sampai pekerjaan selesai	Memadai	1	5	5
Melakukan pendampingan dan pengawasan dengan menggandeng Tim Pengawasan Eksternal (contoh: TP4D) mulai proses pemilihan penyedia jasa sampai pekerjaan selesai	3	3	9	Ada	Sosialiasi dan pendampingan kepada pemilik kapal dan nelayan oleh instansi terkait	Memadai	2	3	6
SDM yang kurang kompeten dan terampil	2	3	6	Ada	Koordinasi dengan instansi terkait tentang informasi pelatihan kompetensi, pengajuan anggaran dan usulan pelatihan SDM	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pelayanan administrasi umum daerah tidak optimal dan sesuai standar layanan	2	3	6	Ada	Melakukan pengajuan tambahan anggaran, melakukan pelatihan peningkatan serta ketrampilan SDM, dilakukan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4
Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	1	2	2	Ada	Pelatihan dan peningkatan kompetensi operator, penataan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya, digitalisasi arsip, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	1	1	1
Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	2	4	8	Ada	Penambahan jumlah anggaran untuk pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, pelatihan kompetensi petugas aset barang, menyusun jadwal pemeliharaan berkala, percepatan penghapusan barang milik daerah yang rusak, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	3	6
pelayanan fungsi pemerintahan belum berjalan lancar	3	3	9	Ada	mengusulkaan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kemampuan sdm	Memadai	3	3	9
perlu peningkatan fasilitas loss ikan	3	3	9	Ada	belum cukup anggaran untuk menangani/belum tersedianya anggaran	Memadai	3	3	9
luas lahan pelabuhan terbatas belum memenuhi standar	3	3	9	Ada	Pemenuhan dokumen pendukung pengembangan pelabuhan	Memadai	3	3	9
anggaran untuk pembangunan dan perawatan terbatas	3	3	9	Ada	pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan	Memadai	3	3	9
kecelakaan kerja nelayan dan pelaku usaha tidak terjamin, kapal diatas 30 GT sudah mendapatkan asuransi dan PKL; sedangkan kapal dibawah 30 GT masih sebagian sedang berproses pembinaanya	3	3	9	Ada	perlu sosialisasi PKL dan Asuransi bagi Nelayan	Memadai	3	3	9
peningkatan komptensi dan ketrampilan untuk pegawai, nelayan dan pelaku usaha (melalui staff meeting, rembug gayeng, rakor SKPD)	3	3	9	Ada	mengikutkan SDM untuk pelatihan yang sesuai	Memadai	3	3	9
Kegiatan operasional administrasi umum perkantoran belum maksimal	3	3	9	Ada	mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun depan	Memadai	3	3	9
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	3	3	9	Ada	Memenuhi Laporan	Memadai	3	3	9
kondisi kendaraan dinas dan asset milik daerah tidak dapat berfungsi dengan baik karena kurangnya pemeliharaan	3	3	9	Ada	mengusulkan penambahan anggaran untuk pemeliharaan asset barang milik daerah di PPP Klidang Lor	Memadai	3	3	9
Pelayanan publik tidak dilaksanakan secara prima	2	3	6	Ada	Peningkatan kompetensi dengan secara aktif SDM mengikuti diklat kompetensi	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Keselamatan kerja nelayan belum terjamin asuransi	3	3	9	Ada	Sosialiasi dan pendampingan kepada pemilik kapal dan nelayan oleh instansi terkait	Memadai	2	3	6
Pelayanan tambat labuh tidak dapat dilaksanakan	4	5	20	Ada	Usulan pengadaan anggaran pengerukan dan koordinasi dengan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	5	15
Dokumen administrasi pendukung pengembangan pelabuhan tidak tersusun	4	4	16	Ada	Penyusunan WKOPP, UKL UPL, KKPR, KKPRL	Belum Memadai	3	4	12
Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) tidak mencapai target	3	4	12	Ada	Penagihan sewa lahan secara rutin (jemput bola)	Memadai	3	3	9
Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak berjalan	4	5	20	Ada	Fasilitasi Perizinan berupa sosialisasi dan pendampingan nelayan	Belum Memadai	3	5	15
Pengelolaan admninistrasi umum PD tidak sesuai standar layanan	2	3	6	Ada	Pengajuan tambahan anggaran untuk fasilitas kantor	Memadai	2	2	4
Terdapat dokumen pendukung laporan penyediaan jasa penunjang PD yang hilang	2	2	4	Ada	Digitalisasi arsip dengan scanning dokumen dan penyimpanan komputer/gdrive	Memadai	1	2	2
Barang milik daerah tidak dapat dipergunakan	3	3	9	Ada	Pengajuan tambahan anggaran untuk pemeliharaan barang milik daerah	Memadai	2	3	6
Fungsi Pemerintahan tidak dapat dilaksanakan	2	2	4	Ada	Membuat pakta integritas, pengawasan berjenjang serta membuat reward and punishment	Memadai	1	1	1
Fungsi Pengusahaan tidak dapat dilaksanakan	2	2	4	Ada	Pembuatan Perjanjian Kerjasama dengan Pengguna Lahan dan pembayaran sewa dilakukan di kantor pelayanan	Memadai	1	1	1
Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	2	1	2	Ada	Meningkatkan validitas pengumpulan data dan koordinasi antar instansi / lembaga	Memadai	1	1	1
Fasilitas Pelabuhan Perikanan tidak berfungsi optimal	4	3	12	Ada	Mencari alternatif sumber pembiayaan dari APBN dan / CSR	Memadai	3	2	6
Nelayan melaut tanpa dilengkapi PKL / Asuransi	4	3	12	Ada	Sosialisasi kepada nelayan	Memadai	4	2	8
SDM tidak kompeten dan tidak terampil	3	1	3	Ada	Mencari alternatif diklat/pelatihan/bimtek online/bebas biaya atau melakukan in house training	Memadai	2	1	2
Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar Layanan tidak tercapai	3	2	6	Ada	Membuat SOP dan Melakukan Pelayanan kepada Pengguna Jasa berdasarkan SOP yang telah ditetapkan; Pengawsan Berjenjang	Memadai	2	1	2
Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun tidak tersusun	2	1	2	Ada	Pengawasan Internal terhadap kegiatan Rutin	Memadai	1	1	1
Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak berfungsi baik	2	2	4	Ada	Pengawasan Internal terhadap kegiatan Rutin	Memadai	1	1	1
Belum terealisasinya outcome pelatihan	3	3	9	Ada	Pendelegasian pekerjaan bagi SDM yang sedang mengikuti pelatihan kepada staf lain	Memadai	1	3	3
Belum lengkapnya dokumen administrasi persyaratan keberangkatan kapal	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan pembinaan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Adanya fasilitas rusak di Pelabuhan Perikanan yang belum mendapatkan perbaikan	3	3	9	Ada	Upaya Penyelesaian P3D serta Mengusulkan RAB pembangunan fisik fasilitas Pelabuhan Perikanan kepada KKP agar dapat diturunkan DAK	Memadai	1	3	3
Belum ada kejelasan wilayah kerja dan operasional PPP Bajomulyo	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan DKP Provinsi dan DKP Kab. Pati	Memadai	3	1	3
Terjadinya blooming enceng gondok yang menyumbat alur sungai	4	4	16	Ada	Melaksanakan bersih kawasan Pelabuhan Perikanan dan Alur Sungai Silugonggo	Belum Memadai	4	1	4
Adanya kepadatan kapal di alur pelayaran sungai silugonggo	4	4	16	Ada	Patroli rutin alur pelayaran oleh tim maritim terpadu (PPP Bajomulyo, Satpolairud Polresta Pati, Pos TNI AL Juwana, UPP Kelas III Juwana, dan TPI Juwana)	Memadai	3	1	3
Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku	3	3	9	Ada	Komunikasi efektif dengan pelaku usaha perikanan tangkap melalui Rembug Gayeng, Forum Koordinasi, dan Patroli rutin serta meningkatkan koordinasi dengan elemen Tim Terpadu Maritim terkait dengan adanya ketentuan kebijakan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.	Memadai	1	3	3
Masih banyaknya aktivitas nelayan dan pekerja pada kapal perikanan yang belum menerapkan kaidah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	4	4	16	Ada	Patroli/Monitoring Kapal Perikanan bersama instansi terkait yang terdiri dari PPP Bajomulyo, Satpolairud Polresta Pati, TNI AL Juwana, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang Wilker Pelabuhan Juwana	Memadai	2	3	6
Adanya Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan	3	3	9	Ada	Review Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur pada setiap layanan di PPP Bajomulyo	Memadai	1	3	3
Kebutuhan jasa air PDAM dan listrik PLN yang tidak sesuai alokasi anggaran	3	3	9	Ada	Pencatatan fluktuasi ekstrim (tertinggi dan terendah) dan menyusun data historis sebagai dasar penyusunan anggaran pada tahun berikutnya	Memadai	1	3	3
Terjadinya kerusakan barang milik daerah yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi	3	3	9	Ada	Menyusun jadwal pemeliharaan berkala dan mencatat jenis kerusakan yang pernah terjadi	Memadai	1	3	3
Pelayanan penerbitan dokumen kesyahbandaran berbayar	3	4	12	Ada	- Secara rutin melakukan pembinaan pegawai - melakukan mutasi internal secara berkala	Belum Memadai	2	4	8
Fungsi pemerintahan yang dilaksanakan tidak memadai	2	3	6	Ada	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar ISO 9001/2015	Memadai	1	2	2
Fungsi pengusahaan yang dilaksanakan terbatas	3	3	9	Ada	Menugaskan SDM untuk mengikuti pengembangan kompetensi	Belum Memadai	3	3	9
Mekanisme sewa lahan tidak sesuai peraturan yang berlaku	4	4	16	Ada	Melakukan patroli pengawasan secara rutin	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak ada dokumen pendukung pengembangan pelabuhan perikanan yang tersedia	3	3	9	Ada	- Menyusun proposal PKKPRL - Melengkapi dokumen WKOPP	Memadai	2	2	4
Fasilitas pelabuhan perikanan tidak layak pakai	2	3	6	Ada	- Melakukan renovasi bangunan secara bertahap - Menjadwalkan perbaikan/perawatan sarpras secara rutin (komputer, AC, kendaraan bermotor dll)	Memadai	2	2	4
Kapal perikanan berangkat tanpa dilengkapi dengan perjanjian kerja laut	3	4	12	Ada	- Mewajibkan setiap kapal untuk dilengkapi dengan dokumen PKL - Tidak menerbitkan PB (Persetujuan Berlayar) bagi kapal yang tidak dilengkapi dengan PKL	Memadai	1	3	3
Tidak ada SDM yang meningkat kopetensinya	2	4	8	Ada	- Mengusulkan SDM untuk mengikuti pengembangan kompetensi - Melakukan pembinaan pegawai secara rutin	Belum Memadai	2	4	8
Layanan administrasi tidak sesuai standar	2	3	6	Ada	- Melakukan perhitungan rencana anggaran secara cermat - Melakukan setiap kegiatan sesuai dengan rencana anggaran yang sudah disepakati	Memadai	1	2	2
Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tersusun dengan baik	3	2	6	Ada	Setiap petugas bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan laporan (rekapitulasi kegiatan bulanan) sehingga pada akhir tahun tinggal menyusun saja	Memadai	1	2	2
Tidak ada barang milik daerah yang terpelihara	1	3	3	Ada	Melakukan pengecekan terhadap bangunan dan barang yang sudah membutuhkan perawatan	Memadai	1	2	2
Pemeliharaan/pengadaan barang/jasa milik daerah tidak melalui sistem pengadaan yang benar	3	4	12	Ada	Selalu mengupayakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui prosedur yang disarankan	Memadai	2	3	6
Fungsi pelayanan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik	3	3	9	Ada	Peningkatan efesiensi SDM yang ada, Perbaikan dan melengkapi sarpras, peningkatan pelayanan	Memadai	3	2	6
Fungsi pelayanan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik	3	4	12	Ada	Peningkatan kualitas SDM, Pembinaan Tenaga pelaksanan dan Monitoring dan pengawasan atasan	Memadai	2	3	6
Fungsi pengusahaan tidak dapat berjalan dengan baik	4	3	12	Ada	Peningkatan kualitas SDM, Pembinaan Tenaga pelaksanan dan Monitoring dan pengawasan atasan	Memadai	3	3	9
Penumpukan piutang oleh penyewa lahan	4	3	12	Ada	Peningkatan kualitas SDM, Pembinaan Tenaga pelaksanan dan Monitoring dan pengawasan atasan	Memadai	3	2	6
Kurangnya dokumen pendukung pengembangan pelabuhan	4	3	12	Ada	Pengajuan perencaan anggaran data pendukung pelabuhan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, perencanaan pembuatan dokumen pendukung.	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Fasilitas pelabuhan banyak yang rusak dan tidak layak	4	3	12	Ada	Perbaikan dan pemilharaan, pengajuan anggaran	Memadai	3	3	9
Perbaikan fasilitas terhambat	4	3	12	Ada	Pemilihan rekanan yang profesional, monitoring dan pengawasan pekerjaan	Memadai	3	2	6
Perbaikan fasilitas terhambat	3	3	9	Ada	Pemilihan rekanan yang profesional, monitoring dan pengawasan pekerjaan	Memadai	2	3	6
Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi / PKL	4	3	12	Ada	Sosialiasi dan pendampingan kepada pemilik kapal serta nelayan oleh instansi terkait	Memadai	3	3	9
SDM yang kurang kompeten dan terampil	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan instansi terkait tentang informasi pelatihan kompetensi, pengajuan anggaran dan usulan pelatihan SDM	Memadai	2	2	4
Pelayanan administrasi umum daerah tidak optimal dan sesuai standar layanan	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan tambahan anggaran, melakukan pelatihan peningkatan serta ketrampilan SDM, dilakukan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4
Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	3	3	9	Ada	Pelatihan dan peningkatan kompetensi operator, penataan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	3	6
Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	2	4	8	Ada	Penambahan jumlah anggaran untuk pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, pelatihan kompetensi petugas aset barang, menyusun jadwal pemeliharaan berkala, percepatan penghapusan barang milik daerah yang rusak, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	3	6
Pelaksanaan perijinan dan kegiatan operasional kapal perikanan belum terlaksana secara maksimal	4	4	16	Ada	Sosialisasi, pengadaan sarpras (CCTV)	Belum Memadai	2	2	4
Nelayan belum terjamin oleh asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan koordinasi terkait asuransi nelayan	Memadai	2	1	2
SDM tidak kompeten dan kurang terampil	2	2	4	Ada	Koordinasi dan pembinaan personil	Memadai	1	1	1
Percepatan pengembangan pelabuhan terhambat	2	3	6	Ada	Peningkatan kemampuan SDM, Koordinasi dengan instansi terkait	Memadai	2	1	2
Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan	3	3	9	Ada	Sosialisasi, pengadaan kontainer sampah dan pemeliharaan jaringan air	Memadai	2	1	2
Kurangnya fasilitas pokok, penunjang, fungsional yang dimiliki pelabuhan	4	3	12	Ada	Pembuatan turap	Memadai	3	3	9
Pegawai kurang kompeten	2	2	4	Ada	Pembagian tugas bagi pegawai secara merata	Memadai	1	1	1
Pembayaran tagihan langganan listrik/air/telepon/internet tidak terpenuhi	3	3	9	Ada	Penambahan anggaran tagihan langganan listrik/air/telepon/internet	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	2	6	Ada	Penentuan skala prioritas pemeliharaan	Memadai	1	1	1
Media/reagen dan peralatan di laboratorium tidak tersedia, rusak dan kadaluarsa	4	4	16	Ada	Rekapitulasi penggunaan dan kebutuhan media/reagen dan peralatan	Memadai	3	4	12
Jumlah sampel yang diujikan di BLPKIL menurun	3	3	9	Ada	Promosi dan penyebaran informasi layanan pengujian melalui media sosial BLPKIL	Memadai	2	2	4
Petugas laboratorium tidak kompeten dalam pengujian	4	4	16	Ada	Peningkatan kompetensi petugas laboratorium melalui magang/pelatihan	Memadai	3	4	12
Hama Penyakit Ikan di lingkungan budidaya tidak terkendali	4	4	16	Ada	Telah dibentuk tim pengendali hama penyakit ikan berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah No. 523.6/53/1 Tahun 2022 serta Sosialisasi pencegahan dan penanganan hama penyakit ikan kepada masyarakat/pelaku usaha budidaya perikanan	Memadai	3	4	12
Terjadinya Resistensi Antimikorba dan obat ikan yang tidak terdaftar	3	3	9	Ada	Pendataan peredaran obat ikan pada 35 Kab/Kota di Jawa Tengah	Memadai	2	2	4
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan ditingkat pembudidaya tidak terkendali	3	3	9	Ada	Sosialisasi kepada pelaku usaha	Memadai	2	2	4
Terhambatnya aktivitas perkantoran	3	3	9	Ada	Pemeliharaan secara berkala	Memadai	2	2	4
Kegiatan pelayanan BLPKIL terhambat	3	3	9	Ada	Rutin pembayaran sesuai jatuh tempo	Memadai	2	2	4
Ketidakpuasan pelanggan dan terganggunya aktivitas pelayanan BLPKIL	4	4	16	Ada	Pengusulan rehabilitasi gedung kantor	Memadai	3	4	12
Bak pembenihan tidak dapat digunakan	3	5	15	Ada	Perbaikan bak pembenihan	Memadai	2	5	10
Adanya kerusakan pada rumah jaga di karamba jaring apung	3	5	15	Ada	Perbaikan rumah jaga di karamba jaring apung	Memadai	2	5	10
Ketrampilan teknis pegawai stagnan	3	5	15	Ada	Peningkatan keterampilan Tenaga Teknis (SDM) Loka	Memadai	2	5	10
Kolam bocor/retak/rusak	3	5	15	Ada	perbaikan kolam budidaya	Memadai	2	5	10
Kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	3	5	15	Ada	Perbaikan kolam budidaya	Memadai	2	5	10
kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	3	5	15	Ada	Perbaikan kolam pendederan dan pemijahan	Memadai	2	5	10
Debit air yang masuk ke kolam berkurang	3	5	15	Ada	Perbaikan saluran air	Memadai	2	5	10
Kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	3	5	15	Ada	perbaikan kolam budidaya	Memadai	2	5	10
Bak pembenihan bocor/retak/rusak	3	5	15	Ada	pembuatan unit produksi benih	Memadai	2	5	10
Pelayanan administrasi umum daerah belum sesuai standar	3	2	6	Ada	Mengusulkan anggaran kegiatan, pelatihan pegawai dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4
Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	3	2	6	Ada	Pelatihan pegawai sesuai tupoksinya, monitoring dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4
Pemanfaatan BMD kurang optimal	3	2	6	Ada	Mengajukan jumlah anggaran yang optimal agar perawatan kendaraan dinas dan BMD lainnya bisa secara rutin	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pelanggaran kepatuhan nelayan terhadap kelengkapan dokumen kapal yang harus dibawa saat melaut	4	4	16	Ada	Mendampingi nelayan yang kesulitan dalam pengurusan perijinan kapal secara online dan melakukan pengawasan kelengkapan dokumen kapal perikanan	Belum Memadai	3	4	12
Pelanggaran kesepakatan pembayaran dari perjanjian sewa lahan yang sudah diterbitkan	4	4	16	Ada	Melakukan kegiatan penarikan retribusi sewa lahan yang dijadwalkan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran penyewa lahan	Belum Memadai	3	4	12
Waktu penyusunan dokumen administrasi pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan yang lebih lama	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan peningkatan kelas dan penyusunan dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum Memadai	3	4	12
Akses keluar dan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak dan sulit dilewati	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran perbaikan akses jalan masuk ke kawasan pelabuhan perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	4	12
Kolam pelabuhan dan alur pelayaran yang semakin dangkal dan sempit	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran perubahan pintu masuk kolam pelabuhan dan anggaran perluasan kolam pelabuhan kepada kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	4	12
Biaya yang besar untuk pengobatan kecelakaan kerja di laut pada nelayan	3	3	9	Ada	Melakukan pendekatan dan sosialiasi kepada pemilik kapal dan nelayan agar segera mengurus asuransi nelayan	Belum Memadai	2	3	6
Waktu penyelesaian pelayanan yang lebih lama dengan kualitas yang rendah	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan dan partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan dan penambahan pegawai di PPP Larangan	Belum Memadai	3	4	12
Terhambatnya kegiatan operasional perkantoran di PPP Larangan	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk fasilitas kantor di PPP Larangan	Belum Memadai	2	3	6
Terdapat tambahan biaya pengeluaran rutin diluar anggaran yang sudah ditetapkan	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk fasilitas penunjang urusan pemerintah daerah di PPP Larangan	Belum Memadai	2	3	6
Aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang semakin rusak	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk pemeliharaan aset barang dan kendaraan di PPP Larangan	Belum Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tingkat pelanggaran tinggi	4	3	12	Ada	Sosialisasi peraturan / Pemahaman Usaha Peraturan Perudang Undangan	Memadai	3	2	6
Pelaku usaha tidak Mengetahui Peraturan perundang-undangan	4	3	12	Ada	Peningkatan pengawasan ke pelaku usaha Sektor KP	Memadai	3	2	6
Sumberdaya kelautan dan perikanan tidak terawasi dengan baik	4	3	12	Ada	Pembinaan	Memadai	3	2	6
Pelaku usaha tidak mengetahui peraturan perundang-undangan	4	3	12	Ada	Sosialisasi peraturan / Pemahaman Peraturan Perundang undangan	Memadai	3	2	6
Rendahnya periode operasi pengawasan sektor KP	4	3	12	Ada	Peningkatan operasi pengawasan Sektor KP	Memadai	3	2	6
Hasil kajian rezonasi kawasan konservasi tidak sesuai dengan fakta di lapangan	3	4	12	Ada	Proses pemilihan dilakukan secara profesional, terbuka dan segala proses pengadaan melalui aplikasi LPSE	Memadai	3	2	6
Tidak tercapainya jumlah stakeholder yang memahami peraturan terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	4	2	8	Ada	Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara aktif, efektif dan interaktif	Memadai	2	1	2
KUGAR tidak terakses teknologi	3	2	6	Ada	Verifikasi lapangan terkait kondisi kelompok calon penerima bantuan	Memadai	1	2	2
Adanya praktek gratifikasi dalam pengadaan Hibah Sarpras Garam	3	5	15	Ada	Proses pemilihan dilakukan secara profesional, terbuka dan segala proses pengadaan melalui aplikasi LPSE	Memadai	2	5	10
KUGAR tidak terbina	2	2	4	Ada	Menjaring data KUGAR dan atau petambak garam yang akan dibina ke Pemerintah Kabupaten	Memadai	1	1	1
Potensi sentra garam rakyat tidak terdata	1	2	2	Ada	Mengokohkan komitmen operator garam dari Kabupaten	Memadai	1	2	2
Kelompok masyarakat pesisir tidak terbina	2	2	4	Ada	Menjaring data taruna pesisir yang aktif dan layak untuk dapat diberikan hibah bantuan ke Pemerintah Kabupaten	Memadai	1	1	1
Ikan hasil produksi, benih, dan pakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria pasar	5	3	15	Ada	sosialisasi pentingnya perizinan usaha budidaya; pembinaan CPIB, CBIB, dan CPPIB	Memadai	5	2	10
Pembudidaya tidak menerapkan teknologi budidaya secara berkelanjutan	4	4	16	Ada	- verifikasi penerima bantuan secara berjenjang - penelaahan proposal bantuan dengan lebih mendalam - sosialisasi dan pelatihan terkait teknologi budidaya yang akan diberikan ke pembudidaya sebelum bantuan diserahkan	Memadai	4	3	12
Dana hibah tidak dibelanjakan oleh kelompok penerima	3	4	12	Ada	- penambahan surat pernyataan bukan anggota keluarga disertai lampiran KK - monitoring dan koordinasi dengan dinas Kab/Kota terkait pembelanjaan dana yang diberikan	Memadai	2	4	8
Materi pelatihan peningkatan keterampilan tidak diserap oleh pembudiaya	3	3	9	Ada	mengadakan pelatihan disertai dengan praktik langsung di lapangan	Memadai	2	2	4
Enumerator tidak mengentri data	4	3	12	Ada	sosialisasi pendataan unit pengolahan ikan	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pelaku usaha pengolahan tidak dapat dipromosikan	4	3	12	Ada	Promosi melalui media sosial dan mengikutsertakan pada kegiatan bazar	Memadai	3	2	6
Pelatihan peningkatan keterampilan tidak menyeluruh	4	2	8	Ada	mengadakan pelatihan peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan pelaku usaha	Memadai	3	1	3
Dana hibah yang diberikan tidak dibelanjakan oleh kelompok penerima	4	4	16	Ada	- verifikasi penerima bantuan secara berjenjang serta penelaahan proposal bantuan dengan lebih mendalam - penerima hibah mengirimkan laporan pertanggungjawaban hibah	Memadai	4	3	12
Tidak ada informasi kebutuhan bahan baku maupun stok ikan	2	4	8	Ada	fasilitasi pendataan dengan mempertemukan antara pelaku usaha dan penyedia jasa logistik	Memadai	2	1	2
Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman cukup tinggi dikarenakan lingkungan penanaman yang kotor, kriteria lokasi/sedimen kurang sesuai, pemeliharaan bibit tidak maksimal sebelum penanaman	5	4	20	Ada	"- Pemilihan bibit mangrove yang baik - Pemilihan lokasi tanam yang sesuai habitatnya - Mencari waktu tanam sesudah musim Barat (menghindari gelombang dan cuaca ekstrim) - Adanya masa pemeliharaan 90 hari setelah penanaman"	Memadai	4	3	12
"Lokasi penanaman mangrove yang dilakukan belum sesuai dengan pembagian lokasi penanaman dari Bappeda Jateng "	3	3	9	Ada	- Survei untuk menentukan lokasi yang aman dan sesuai untuk penanaman mangrove	Memadai	2	2	4
Keselamatan petugas pada saat penenggelaman Terumbu Karang Buatan (TKB)	4	4	16	Ada	- Pemantauan cuaca sebelum penenggelaman TKB - Koordinasi dengan team penenggelaman TKB untuk menghindari kecelakaan kerja	Memadai	3	4	12
Pelanggaran pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	4	3	12	Ada	- Sosialisasi stakeholder yang berkaitan - Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi perairan	Memadai	2	2	4
Jumlah penerbitan perizinan berusaha masih rendah	3	2	6	Ada	Sosialisasi dan pendampingan penerbitan perizinan berusaha yang dihadiri pelaku usaha dan petugas perizinan kabupaten/kota	Memadai	3	1	3
Meningkatnya pelanggaran kegiatan perikanan tangkap terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	5	3	15	Ada	- Koordinasi dan Sosialisasi di Desa/ Dinas Kab/Kota terkait pentingnya pengurusan dokumen kapal	Memadai	3	4	12
Keselamatan Petugas Pengawasan	4	4	16	Ada	- Pemeliharaan kapal secara rutin - Peningkatan kompetensi ABK	Memadai	3	4	12
Meningkatnya pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	3	3	9	Ada	- Menambah papan pengumuman/banner di pelabuhan perikanan sebagai alat bantu sosialisasi	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
kegiatan rehabilitasi kantor secara terukur	3	4	12	Ada	melaksanakan koordinasi komperhensif dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku Induk Instansi terkait perlunya penambahan anggaran pemeliharaan gedung kantor dan pemberitahuan warga sekitar pemilik tambak yang melekat di sekitar kantor CDKWB	Belum Memadai	3	3	9
Tidak terpenuhi pembayaran tarif listrik dalam 1 tahun	3	3	9	Ada	Perencanaan anggaran tahun yad dinaikkan anggaran tarif listrik	Memadai	1	3	3
Kerusakan barang inventaris kantor	2	2	4	Ada	Penambahan anggaran pemeliharaan	Memadai	1	2	2
Mangrove yang ditanam mengalami kerusakan, kematian, atau hilang terkena ombak	3	3	9	Ada	Survei untuk menentukan lokasi yang aman dan sesuai untuk penanaman mangrove	Memadai	2	2	4
Jumlah penerbitan perizinan berusaha masih rendah	3	3	9	Ada	Pendampingan penerbitan perizinan berusaha yang dihadiri pelaku usaha dan petugas perizinan kabupaten/kota	Memadai	2	2	4
Pemeriksaan tidak terselesaikan	1	2	2	Ada	Peningkatan kompetensi dan Penambahan Personel Pengawasan	Memadai	1	1	1
Rendahnya intensitas patroli pengawasan SDKP dengan speedboat	4	3	12	Ada	Pemeliharaan Speedboat secara berkala (Docking 1 Tahun sekali)	Belum Memadai	4	3	12
Pemeriksaan tidak terselesaikan	1	2	2	Ada	Peningkatan kompetensi dan penambahan Personel Pengawasan	Memadai	1	1	1
Harga barang di GO lebih tinggi dari RAB sehingga tidak dapat melakukan transaksi	2	3	6	Ada	Penyusunan rencana anggaran pembelian barang disesuaikan dengan harga barang pada aplikasi GO	Memadai	1	1	1
Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	3	4	12	Ada	Perencanaan anggaran tahun yang akan datang dinaikkan anggaran tarif listriknya	Belum Memadai	3	4	12
Barang yang rusak tidak dapat segera diperbaiki	2	3	6	Ada	Penambahan Anggaran Pemeliharaan	Memadai	1	3	3
Penanaman Mangrove yang ditanam pada lokasi yang telah ditentukan mengalami kerusakan, kematian, atau hilang terkena ombak	5	3	15	Ada	Survei lokasi dan identifikasi jenis mangrove yang sesuai untuk ditanam	Memadai	4	3	12
Tidak terpenuhinya penilian EVIKA	4	4	16	Ada	Meningkatkan kualitas SDM pengelola dalam pengelolaan kawasan konservasi	Memadai	4	3	12
Biota target di kawasan konservasi mengalami penurunan	4	4	16	Ada	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat	Memadai	4	3	12
Jumlah penerbitan perizinan berusaha masih rendah	3	3	9	Ada	sosialisasi dan pendampingan penerbitan perizinan berusaha	Memadai	1	2	2
Petugas pengawasan tidak kompeten	3	3	9	Ada	Mengikuti pelatihan dan bimtek pengawasan SDKP	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak terawasinya WPPNRI 712 dari kegiatan IIU fishing	3	3	9	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan di wilayah perairan sampai 12 mil hingga cakupan perairan pantura timur wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Memadai	3	2	6
Petugas pengawasan tidak kompeten	3	3	9	Ada	Mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimtek pengawasan SDKP	Memadai	2	2	4
Tidak terpenuhinya pembelanjaan Barang sesuai RAB	1	3	3	Ada	mencari harga yang sesuai dengan RAB	Memadai	1	2	2
Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	3	3	9	Ada	Dilakukan penambahan anggaran melalui perubahan anggaran	Memadai	3	2	6
Barang yang rusak tidak dapat segera diperbaiki	2	3	6	Ada	Penambahan anggaran pemeliharaan pada saat perubahan	Memadai	1	3	3
UPI tidak terlayani pelayanan pembinaan SKP	3	4	12	Ada	pembinaan kepada UPI menggunakan metode Remote Assement dan menginventarisir UPI yang perlu dibina dengan menggunakan skala prioritas (yang perlu dikunjungi secara langsung)	Memadai	3	3	9
pelaku usaha enggan dan tidak tertarik mendapatkan sertifikasi SNI	3	3	9	Ada	Melakukan sosialisasi melalui media digital, melakukan penjaringan klien	Memadai	2	3	6
Target penerbitan Certifikat Analysis Test tidak terpenuhi	3	3	9	Ada	Terus melakukan pemeliharaan ruang lingkup pengujian yang sudah terakreditasi (20 parameter)	Memadai	3	2	6
peralatan pengujian tidak bisa beropoerasi dengan laik	3	4	12	Ada	Terus Updating teknologi peralatan laboratorium	Belum Memadai	3	3	9
Ketersediaan media dan reagen pengujian yang tidak mencukupi untuk melakukan pekerjaan pengujian	3	4	12	Ada	Pengajuan Surat Rekomendasi Penggunaan Media dengan TKDN 0%	Memadai	2	3	6
sarana dan prasarana pelayanan kantor tidak terawat dengan baik	3	3	9	Ada	Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana prioritas	Memadai	2	2	4
Terhambatnya kegiatan pelayanan akibat terhentinya suplai air dan listrik untuk kegiatan operasional	2	3	6	Ada	Melakukan komunikasi dengan penyedia jasa	Memadai	1	2	2
Kurang optimalnya kegiatan operasional kantor dan pelayanan	3	3	9	Ada	Mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas berdasarkan skala prioritas	Memadai	2	3	6

Tabel

Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah ikan hasil tangkapan di laut jawa menurun	12	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kerusakan habitat ikan	Lokasi penangkapan ikan semakin jauh dan kebutuhan perbekalan melaut bertambah
Pelayanan Kepelabuhan tidak maksimal	16	Kepala PPP Lohgending	Tidak tersedianya sapras yang memadai	Rendahnya kepuasan publik atas layanan PPP Lohgending
Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan keamanan operasional pelabuhan tidak berjalan optimal	16	Kepala PPP Lohgending	kurangnya sapras dan pengawasan kegiatan nelayan di kawasan pelabuhan	Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan dan kegiatan operasional kapal perikanan tidak optimal, Jumlah kapal di kawasan pelabuhan kurang termonitor
Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan	16	Kepala PPP Lohgending	kurangnya fasilitas yang memadai	pemanfaatan Fasilitas pelabuhan terlaksana kurang optimal
percepatan pengembangan pelabuhan terhambat	16	Kepala ppp Lohgending	Belum adanya sertifikat tanah pelabuhan sebagai salah satu bentuk penguasaan terhadap suatu wilayah kerja	Penyusunan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) terhambat
kurangnya fasilitas pokok, penunjang, fungsional yang dimiliki pelabuhan	16	Kepala PPP Lohgending	sapras tidak memadai	Kegiatan operasional pelabuhan terhambat
nelayan belum terjamin oleh asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	16	Kepala PPP Lohgending	Kurangnya kesadaran nelayan/pemilik kapal akan pentingnya asuransi	Nelayan tidak memperoleh santunan jika terjadi laka laut
SDM tidak kompeten dan kurang terampil	16	Kepala PPP Lohgending	SDM tidak cakap melayani	Pelayanan PPP Lohgending tidak optimal

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelayanan dan kinerja terhambat	16	Kepala PPP Lohgending	Pegawai tidak kompeten	kegiatan Operasional kedinasan tidak terpenuhi, nilai kepuasan msyarakat menurun
Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	12	Kasubbag TU	Barang Milik Daerah yang rusak tidak dapat diperbaiki	kegiatan pelayanan dan operasional kantor terhambat
Wabah penyakit ikan tertentu tidak tertangani	12	BLPKIL	Kompetensi dan fasilitas pengujian belum ada	Sebaran Hama dan Penyakit Ikan semakin meluas
Kegiatan operasional tidak berjalan dengan baik	12	BLPKIL	SOP operasional tidak diterapkan	Ketidakpuasan pelanggan dan penurunan kinerja pegawai
adanya kerusakan pada rumah jaga di karamba jaring apung	10	Kepala BBIAPL Kelas A	terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi tidak tercapai
Terhambatnya pelayanan kepelabuhanan yang diberikan kepada nelayan	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan anggaran dalam peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana dan SDM di PPP Larangan	Penurunan nilai produksi perikanan tangkap dan ekonomi di PPP Larangan
Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Lokasi penanaman merupakan daerah rawan sedimentasi atau daerah yang harus dilakukan pembersihan lahan dengan anggaran yang besar	Target rehabilitasi mangrove yang sesuai dengan pembagian wilayah penanaman dari Bappeda Jateng tidak dapat terpenuhi
Terjadinya Peningkatan Kasus Pelanggaran	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Kurangnya kepedulian pelaku usaha terhadap kelengkapan dokumen berusaha	Kapal perikanan beroperasi tanpa dilengkapi dokumen periznan yang berlaku
Ketergantungan nahkoda dan ABK dari Instansi lain	16	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Tidak ada tenaga Nahkoda dan ABK kapal pengawasan CDK Wil Selatan	Kegiatan pengawasan terhambat

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Lokasi penanaman mangrove berada pada pesisir yang berbatasan langsung dengan laut	Target luas lahan penanaman mangrove yang direhabilitasi tidak terpenuhi
Pemberian gratifikasi pada pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa	16	Ketua Kelompok Kerja Kepelabuhan dan Kenelayanan	Penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh penyedia tidak selesai tepat waktu dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak	Kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan kerugian negara
Pelayanan tambat labuh tidak dapat dilaksanakan	15	Kepala PPP Tawang	Sedimentasi di sepanjang dermaga	Fasilitas plabuhan perikanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal
Dokumen administrasi pendukung pengembangan pelabuhan tidak tersusun	12	Kepala PPP Tawang	Data dukung pelabuhan perikanan tidak update dan akurat	Pengembangan pelabuhan perikanan terhambat
Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak berjalan	15	Kepala PPP Tawang	Dokumen perizinan kapal tidak lengkap	Ketidakaturan aktivitas perikanan tangkap
Mekanisme sewa lahan tidak sesuai peraturan yang berlaku	16	Kepala PPP Tasikagung	Kurangnya pengawasan	Layout kawasan pelabuhan tidak sesuai masterplan
Media/reagen dan peralatan di laboratorium tidak tersedia, rusak dan kadaluarsa	12	BLPKIL	Penambahan Ruang Lingkup disetiap laboratorium membutuhkan support peralatan dan media reagen	Parameter pengujian tertentu tidak dapat diujikan dan tidak tersertifikasi
Petugas laboratorium tidak kompeten dalam pengujian	12	BLPKIL	Penyelenggara pelatihan tidak menyediakan jenis kompetensi penunjang kegiatan laboratorium	Kompetensi petugas laboratorium berpengaruh dalam penambahan ruang lingkup parameter pengujian

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hama Penyakit Ikan di lingkungan budidaya tidak terkendali	12	BLPKIL	Monitoring dan pengendalian HPI tidak dilakukan diseluruh pembudidaya di Jawa Tengah	Produksi ikan budidaya menurun
Ketidakpuasan pelanggan dan terganggunya aktivitas pelayanan BLPKIL	12	BLPKIL	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Kondisi barang dan peralatan kantor penunjang pelayanan rusak
Bak pembenihan tidak dapat digunakan	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Bak pembenihan retak/bocor/rusak	Target produksi tidak tercapai
Adanya kerusakan pada rumah jaga di karamba jaring apung	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi tidak tercapai
Ketrampilan teknis pegawai stagnan	10	Kepala BBIAPL Kelas A	tidak adanya pelatihan ketrampilan teknis bagi pegawai	Kurang optimalnya produktivitas budidaya di masing-masing lokasi
Kolam bocor/retak/rusak	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan endemik tidak tercapai
Kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Adanya kebocoran pada kolam budidaya	target produksi tidak tercapai
kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Adanya kerusakan pada kolam pendederan dan pemijahan	target produksi benih tidak tercapai
Debit air yang masuk ke kolam berkurang	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Adanya kerusakan pada saluran air	target produksi induk bermutu tidak tercapai
Kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	10	Kepala BBIAPL Kelas A	adanya kebocoran pada kolam budidaya	target produksi ikan konsumsi tidak tercapai
Bak pembenihan bocor/retak/rusak	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Terdapat fasilitas budidaya benih yang kurang memadai	target produksi benih unggul tidak tercapai

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelanggaran kepatuhan nelayan terhadap kelengkapan dokumen kapal yang harus dibawa saat melaut	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan kemampuan SDM nelayan di PPP Larangan dalam mengurus perijinan kapal secara online dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang	Pemberian sanksi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang ada
Pelanggaran kesepakatan pembayaran dari perjanjian sewa lahan yang sudah diterbitkan	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Kurangnya kesadaran dari penyewa lahan untuk membayar retribusi sewa lahan	Target PAD retribusi sewa lahan yang tidak terpenuhi
Waktu penyusunan dokumen administrasi pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan yang lebih lama	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Terhambatnya penyusunan dokumen administrasi pengembangan Pelabuhan Perikanan oleh status kelas pelabuhan yang ditetapkan oleh KKP	Pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan yang terhambat dan tidak bisa dilaksanakan
Akses keluar dan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak dan sulit dilewati	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan anggaran untuk perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan	Penurunan jumlah pengunjung dan pelaku usaha di kawasan PPP Larangan
Kolam pelabuhan dan alur pelayaran yang semakin dangkal dan sempit	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan Anggaran untuk perubahan pintu masuk dan perluasan kolam pelabuhan	Penurunan jumlah trip harian dan nilai produksi perikanan tangkap di PPP Larangan
Waktu penyelesaian pelayanan yang lebih lama dengan kualitas yang rendah	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan jumlah SDM pegawai di PPP Larangan yang kompeten dalam memberikan pelayanan	Penurunan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PPP Larangan
Adanya praktek gratifikasi dalam pengadaan Hibah Sarpras Garam	10	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Hubungan pertemanan/kekerabatan dan atau pihak penyedia menginginkan pekerjaan tesebut	Kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ikan hasil produksi, benih, dan pakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria pasar	10	Kepala Bidang UPK	Pelaku usaha belum memahami pentingnya perizinan usaha budidaya (CPIB, CBIB, dan CPPIB)	Ikan konsumsi, benih, dan pakan yang dihasilkan tidak terjual dipasaran dan tidak dapat masuk ke pangsa pasar yang lebih luas
Pembudidaya tidak menerapkan teknologi budidaya secara berkelanjutan	12	Kepala Bidang UPK	Pembudidaya belum menguasai teknologi budidaya yang diterapkan	Bantuan yang diberikan mangkrak dan tidak dimanfaatkan kembali
Dana hibah yang diberikan tidak dibelanjakan oleh kelompok penerima	12	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Ada tindakan manipulatif/penggelapan dana oleh kelompok penerima	Kerugian aset negara/pemerintah
Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman cukup tinggi dikarenakan lingkungan penanaman yang kotor, kriteria lokasi/sedimen kurang sesuai, pemeliharaan bibit tidak maksimal sebelum penanaman	12	1. Ka. Sie Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan 2. Ka. Cabang Dinas Kelautan dan Wilayah Barat	Musim saat penanaman yang tidak mendukung, lahan tidak cocok	Bibit Mangrove tidak tumbuh/mati, bibit hilang karena ombak
Keselamatan petugas pada saat penenggelaman Terumbu Karang Buatan (TKB)	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	TKB Berat dan gelombang laut yang tinggi	Kecelakaan Kerja (Luka/ Kematian)
Meningkatnya pelanggaran kegiatan perikanan tangkap terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	12	1. Ka. Sie Pengawasan 2. Ka. Cabang Dinas Kelautan dan Wilayah Barat	Kurangnya kepedulian nelayan terkait pentingnya pengurusan dokumen kapal dan penggunaan peralatan tangkap yang ramah lingkungan	Banyak ditemukan pelanggaran dokumen kapal, rusaknya lingkungan karena pemakaian peralatan tidak ramah lingkungan
Keselamatan Petugas Pengawasan	12	1. Ka. Sie Pengawasan 2. Ka. Cabang Dinas Kelautan dan Wilayah Barat	Kondisi kapal tidak terawat, cuaca buruk, kurang keahlian personil ABK	Mesin kapal rusak saat di laut, kecelakaan saat di laut
Rendahnya intensitas patroli pengawasan SDKP dengan speedboat	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Rendahnya intensitas patroli pengawasan SDKP dengan speedboat	Banyak pelaku usaha dan kapal perikanan yang beroperasi tidak terperiksa
Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Kenaikan tarif listrik yang tidak bisa diprediksi	Tidak dapat dilakukan pembayaran listrik

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penanaman Mangrove yang ditanam pada lokasi yang telah ditentukan mengalami kerusakan, kematian, atau hilang terkena ombak	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Kondisi cuaca dipesisir pantura yang extrem	Tingkat kelulus hidupan mangrove yang ditanam sangat rendah
Penanaman Mangrove yang ditanam pada lokasi yang telah ditentukan mengalami kerusakan, kematian, atau hilang terkena ombak	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Kondisi cuaca dipesisir pantura yang extrem	Tingkat kelulus hidupan mangrove yang ditanam sangat rendah
Tidak terpenuhinya penilian EVIKA	12	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Kurangnya pemahaman pengelola dalam mengelola kawasan konservasi	Terjadi penurunan nilai EVIKA
Biota target di kawasan konservasi mengalami penurunan	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Kurangnya pemahaman masyrakat terkiat kawasan konservasi	Sumber Daya Ikan di sekitar Kawasan Konservasi berkurang

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2025- 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan	Kematian ikan	12	Adanya hama dan penyakit ikan	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Monitoring hama dan penyakit ikan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
		Benih ikan tidak tumbuh berkembang	12	Benih ikan tidak bermutu.	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Sertifikasi dan pembinaan perbenihan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
		Nelayan tidak melaut	12	cuaca buruk dan tingginya biaya operasional melaut	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Hibah/bantuan kepada nelayan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
		Nelayan melaut semakin jauh	12	Menurunnya Sumber Daya Ikan di laut	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Pembuatan Terumbu Karang Buatan dan pengawasan penggunaan alat tangkap	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam	Petambak garam tidak dapat berproduksi	16	Tingginya curah hujan	Volume produksi garam turun	Penggunaan teknologi geo membran dan tunnel dalam produksi garam	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
		Petambak garam tidak dapat berproduksi	16	Proses produksi masih tradisional	Volume produksi garam turun	Bantuan/hibah peralatan produksi garam kepada petambak garam	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
Meningkatnya Luasan Mangrove Yang Direhabilitasi	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	Matinya bibit mangrove yang ditanam	12	Lokasi dan jenis tanah tidak sesuai	Ekosistem pesisir rusak	Jenis mangrove sesuai dengan jenis tanah	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelayanan lambat	9	Personil OPD tidak memahami tugasnya	Kebutuhan masyarakat tidak terlayani	Rapat evaluasi dan pengendalian kegiatan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029
		Pelayanan lambat	9	Personil OPD tidak berorientasi pelayanan	Kebutuhan masyarakat tidak terlayani	Sosialisasi dan kanal aduan	Kepala OPD	Tahun 2025-2029

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komoditas pangan utamanya sektor pertanian menjadi hal yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, komoditas pertanian juga berperan dalam mendorong pertumbuhan agroindusti di hilir dan ekspor untuk meningkatkan devisa negara.

Di sisi lain, isu swasembada pangan merupakan tugas utama yang tidak ringan, salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian, perkebunan dan peternakan diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Pembangunan sektor pertanian ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar semakin terbatasnya sumberdaya air dan lahan, terjadinya perubahan iklim global, serangan organisme pengganggu tanaman, terbatasnya akses petani terhadap inovasi teknologi dan permodalan, kapasitas kelembagaan petani yang masih perlu peningkatan serta stabilitas harga komoditas pertanian yang cenderung berfluktuasi. Selain itu, sektor peternakan juga menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan ketersediaan pakan berkualitas, belum optimalnya produktivitas ternak, risiko penyakit hewan menular strategis, keterbatasan akses teknologi dan inovasi peternakan, serta tuntutan mutu, keamanan, kehalalan, dan daya saing produk peternakan. Guna mengatasi berbagai persoalan tersebut diperlukan kebijakan, strategi dan langkah-langkah konkret yang tejabarkan dalam rencana program kegiatan pembangunan baik dalam jangka panjang, menegah maupun tahunan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian serta kesejahteraan pelaku budidaya dan usaha perrtanian.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Tahun 2024, telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak untuk menetapkan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal ini, maka periode pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah dimulai sejak dilantiknya Gubenur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj. Yasin Maimoen pada tanggal 20 Februari 2025. RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun sebagai pelaksanaan dari visi misi pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Adapun Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan menjadi 6 (enam) misi, yaitu: 1) Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global; 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas; 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif; 5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; serta 6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintergrasi. Selain itu, Renstra Tahun 2025-2029 juga disusun untuk menjabarkan dukungan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dokumen Renstra selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun untuk menjabarkan visi, misi dan program daerah serta upaya untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam peningkatan produksi pertanian. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai arahan strategis pelaksanaan pembangunan pertanian di Jawa Tengah. Selanjutnya tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1) Memberikan arah pembangunan sektor pertanian di Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun;
2) Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah serta *stakeholders* pertanian lainnya;
3) Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi awal sampai akhir pelaksanaan program.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab I menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis

Bab II menguraikan gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah yang memuat peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya beserta tantangan dan isu strategis pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;

Bab III. Tujuan, Sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan

Bab III menguraikan tujuan, sasaran, startegi dan arah kebijakan pembangunan pertanian jangka menengah yang disertai indikator kinerja dan target selama tahun 2025-2029.

Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Peternakan

Bab IV menguraikan tentang rencana program, keguatan dan sub kegiatan disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif serta sub kegiatan yang mendukung program-program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Bab IV juga memuat indikator kinerja perangkat daerah termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Bab V. Penutup

Bab V menguraikan berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PEMASALAHAN DAN ISU STARTEGIS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Mendasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan. Adapun Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang kelembagaan, bidang perkebunan, bidang peternakan, dan bidang veteriner;
2. pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang kelembagaan, bidang perkebunan, bidang peternakan, dan bidang veteriner;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang kelembagaan, bidang perkebunan, bidang peternakan, dan bidang veteriner;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi Sekretariat, bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kelembagaan, peternakan, veterniner, UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya..

2. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan terkait prasarana, sarana, alat mesin pertanian dan peternakan;
b. pelaksanaan kebijakan terkait prasarana, sarana, alat mesin pertanian dan peternakan;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait prasarana, sarana, alat mesin pertanian dan peternakan;
d. monitoring dan evaluasi terkait prasarana, sarana, alat mesin pertanian dan peternakan;
e. pelaporan dan rekomendasi terkait prasarana, sarana, alat mesin pertanian dan peternakan;
f. pelaksanaan pendampingan teknis pemanfaatan prasarana, sarana dan alat mesin pertanian dan peternakan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Budidaya Tanaman Pangan dan hortikultura mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan komoditas padi, palawija dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;

b. pelaksanaan kebijakan komoditas padi, palawija dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;

c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan komoditas padi, palawija dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;

d. monitoring dan evaluasi kebijakan komoditas padi, palawija dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;

e. pelaporan dan rekomendasi kebijakan komoditas padi, palawija dan hortikultura serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;

b. pelaksanaan kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;

c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;

d. monitoring dan evaluasi kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar;

e. pelaporan dan rekomendasi kebijakan komoditas tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan penerapan budidaya, penanganan komoditas yang baik dan benar; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kelembagaan

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan terkait kelembagaan, pembiayaan dan kerjasama pertanian dan peternakan;
b. pelaksanaan kebijakan terkait kelembagaan, pembiayaan dan kerjasama pertanian dan peternakan;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait kelembagaan, pembiayaan dan kerjasama pertanian dan peternakan;
d. monitoring dan evaluasi terkait kelembagaan, pembiayaan dan kerjasama pertanian dan peternakan;
e. pelaporan terkait kelembagaan, pembiayaan serta kerjasama pertanian dan peternakan;; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, pakan dan bibit.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pakan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bibit; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Bidang Veteriner

Bidang Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang obat hewan dan keamanan produk hewan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Veteriner mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tentang obat hewan dan keamanan produk hewan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tentang kesehatan hewan;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tentang kesehatan masyarakat veteriner; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Balai Pelatihan Pertanian

Balai Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan peternakan serta penjaminan mutu dan kompetensi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Balai Pelatihan Pertanian mempunyai fungsi:

a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan peternakan serta penjaminan mutu dan kompetensi ;
b. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dan pembinaan bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan peternakan serta penjaminan mutu dan kompetensi;
c. melaksanakan analisa kebutuhan pelatihan dan bimbingan teknis;
d. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, penjaminan mutu dan uji kompetensi yang meliputi rekrutmen peserta, menyusun modul, narasumber, jadwal, dan sarana prasarana penunjang;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan peternakan serta penjaminan mutu dan kompetensi ;
f. pengelolaan ketatausahaan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi:

a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
b. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dan pembinaan bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
c. melaksanakan pengawasan peredaran mutu benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
d. melaksanakan pembinaan kepada produsen dan pengedar benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
e. melaksanakan uji adaptasi varietas tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura;

f. melaksanakan observasi varietas unggul lokal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
g. melaksanakan pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
i. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya..

10. Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang, Wilayah Banyumas, dan Wilayah Surakarta.

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Wilayah Semarang dan Wilayah Surakarta mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang produksi, distribusi, pemasaran benih dan produk lainnya komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang, Wilayah Banyumas, dan Wilayah Surakarta melaksanakan fungsi:

a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional bidang produksi, distribusi, pemasaran benih dan produk lainnya komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
b. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dan pembinaan bidang produksi, distribusi,pemasaran benih dan produk lainnya komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
c. melaksanakan produksi, perbanyakan,budidaya benih dan produk lainnya komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
d. melaksanakan pemasaran benih dan produk lainnya komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
e. melaksanakan pemasaran benih dan produk lainnya komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
f. melaksanakan pelayanan perbenihan kepada masyarakat;
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, distribusi, pemasaran benih dan produk lainnya komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
h. pengelolaan ketatausahaan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Balai Pelindungan Tanaman

Balai Pelindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Pelindungan Tanaman mempunyai fungsi:

a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional bidang pelindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknis operasional dan pembinaan bidang pelindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
c. melaksanakan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan;
d. melaksanakan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengembangan pestisida nabati dan hayati, kajian uji coba pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pangan, hortikultura, dan perkebunan;
e. melaksanakan penanganan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim terhadap tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
f. melaksanakan peningkatan pemahaman petani dalam antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, pengenalan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
h. pengelolaan ketatausahaan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah

Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemeliharaan ternak dan produksi dan distribusi.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang bidang pemeliharaan ternak dan produksi dan distribusi;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal dibidang bidang pemeliharaan ternak dan produksi dan distribusi;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan ternak dan produksi dan distribusi;
d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah

Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pembibitan Ternak Ruminansia dan Pembibitan Ternak Nonruminansia.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang bidang Pembibitan Ternak Ruminansia dan Pembibitan Ternak Nonruminansia;

b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal dibidang Pembibitan Ternak Ruminansia dan Pembibitan Ternak Nonruminansia;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang Pembibitan Ternak Ruminansia dan Pembibitan Ternak Nonruminansia;
d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian

Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang standarisasi, pengujian, pengawasan, rekayasa, dan pengembangan mekanisasi dan modernisasi pertanian.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional bidang standarisasi, pengujian, pengawasan, rekayasa, dan pengembangan mekanisasi dan modernisasi;
b. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dan pembinaan bidang standarisasi, pengujian, pengawasan, rekayasa, dan pengembangan mekanisasi dan modernisasi;
c. melaksanakan analisis dan pengujian alat mesin dan pertanian dan peternakan;
d. melaksanakan perekayasaan alat mesin pertanian dan peternakan;
e. melaksanakan pengembangan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian dan peternakan;
f. melaksanakan perawatan alat mesin pertanian dan peternakan;
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, pengujian, pengawasan, rekayasa, dan pengembangan mekanisasi dan modernisasi;
h. melaksanakan fasilitasi penggunaan dan peminjaman aset alat mesin pertanian;
i. pengelolaan ketatausahaan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

15. Balai Pelayanan Veteriner Ternak Jawa Tengah

Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal dibidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan;

d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang ada pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
2. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP);
3. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP);
4. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT);
5. Jabatan Fungsional Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT);
6. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (PAMP);
7. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan (Wastukan);
8. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak);
9. Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
10. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner;
11. Jabatan Fungsional Penelaah Teknis;
12. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur;
13. Jabatan Fungsional Perencana;
14. Jabatan Fungsional Arsiparis;
15. Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah

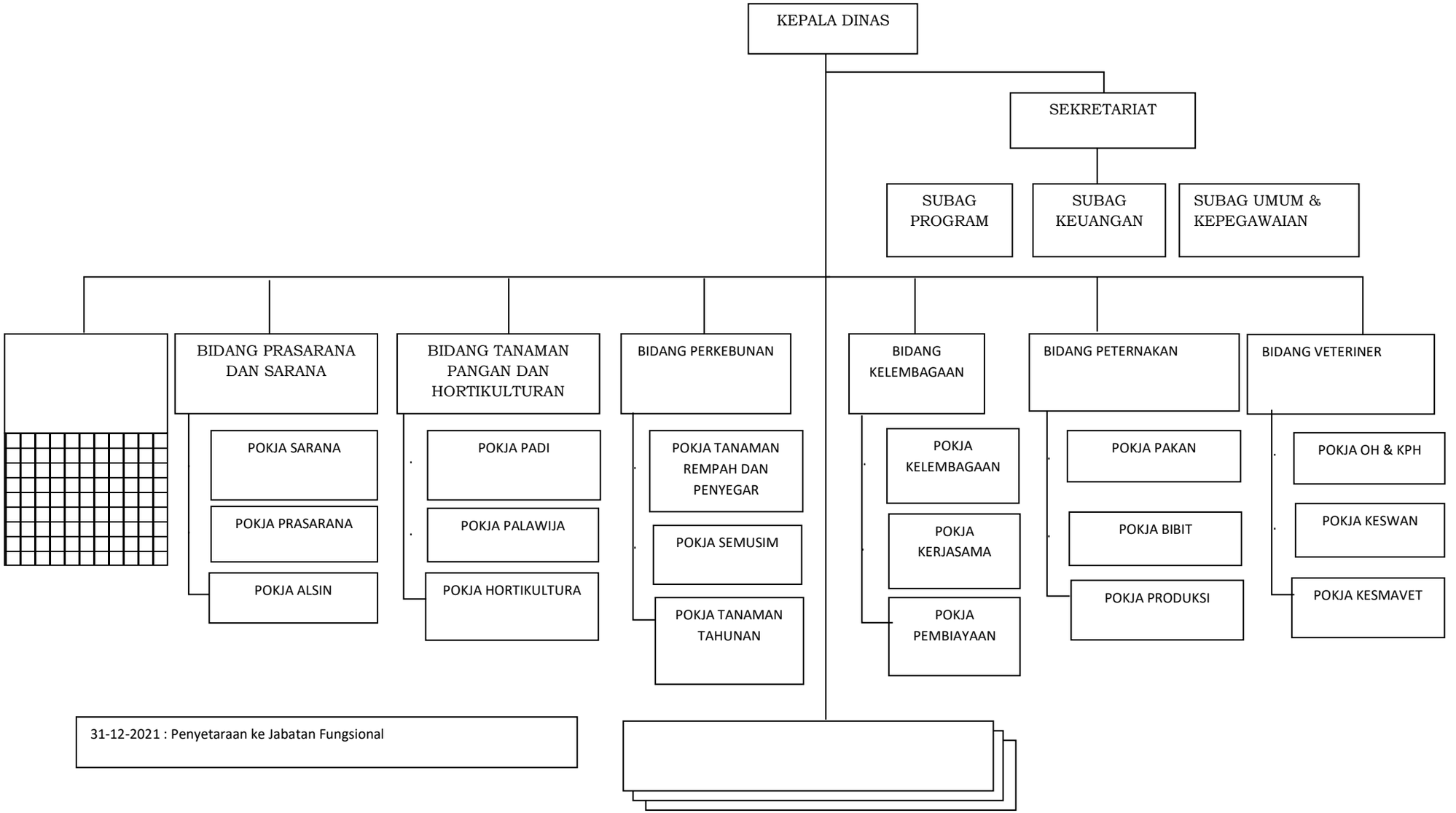

Struktur Organisasi UPTD/Balai

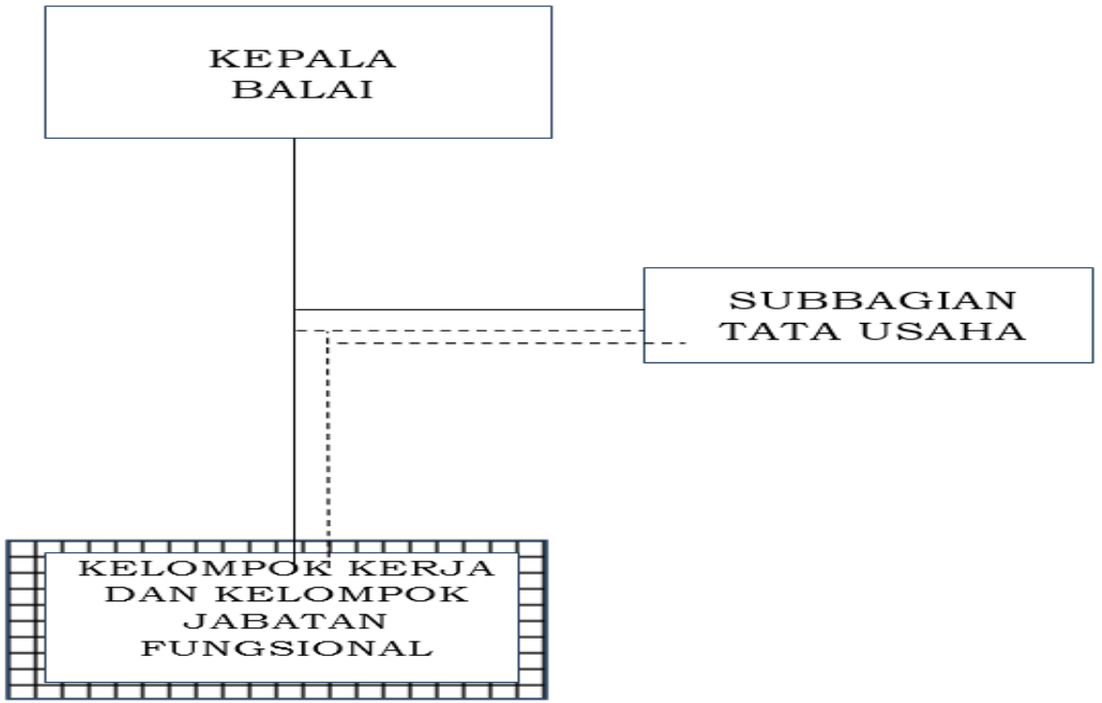

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah

Dalam konteks pembangunan daerah, pembangunan pertanian dan perkebunan memiliki posisi kunci, karena potensi sumberdaya manusia dan alam sebagai asset utama pembangunan berada dalam sektor tersebut. Namun demikian, potensi tersebut belum optimal, disebabkan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia pertanian dan peternakan terdiri dari aparat pemerintah termasuk petugas lapangan, meliputi :

- Jumlah aparat Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah pada 2025 sebanyak 755 orang ASN. Berdasarkan tingkat pendidikan diantaranya terdapat lulusan Pasca Sarjana (S3) sebanyak 2 orang, (S2) sebanyak 70 orang, Sarjana/Diploma IV (S1/DIV) 259 orang, Sarjana Muda/DIII 80 orang, DII/D1 1 orang, SLTA 152 orang, dan SLTP 17 orang, dan lulusan SD 11 orang.
- Komposisi pegawai terdiri dari pejabat struktural 22 orang yang terdiri dari Eselon II (1 orang), Eselon III (16 orang), Eselon IV (6 orang), sedangkan jumlah pejabat fungsional pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
  a. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 26 orang;
  b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 22 orang;
  c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) , jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 13 orang;
  d. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT), jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 94 orang;
  e. Jabatan Fungsional Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) 99 orang;
  f. PPPK (Formasi Penyuluh Pertanian) sebanyak 75 orang dan Tenaga Bantu POPT sebanyak 99 orang;
  g. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (PAMP), jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 3 (satu) orang;
  h. Jabatan Fungsional Medik Veteriner jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 32 orang;
  i. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 17 orang;
  j. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 18 orang;
  k. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner jumlah PNS/CPNS (termasuk penyetaraan) sebanyak 3 orang;
  l. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, arsiparis, pranata komputer, jumlah PNS/CPNS sebanyak 15 orang;
- Jumlah Non ASN yang penghasilannya bersumber dari Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

A. Non ASN (Non Outsorsing) berjumlah 231 orang yaitu :

Tabel 2.1.

Pegawai Non ASN

No	Lokasi/ Penempatan	Jumlah (orang)		Jumlah (orang)	Sumber Biaya	Ket
		Teknis	Non Teknis			
1.	Sekretariat			22	APBD	
2.	Bid. TP	4	4	8	APBD	
3.	Bid. Hortikultura			3	APBD	
4.	Bid. Perkebunan			3	APBD	
5.	Bid. P2BU			15	APBD	
6.	Bid. PSP			2	APBD	
7.	Bid. Peternakan			7	APBD	
8.	Bid. Vet			5	APBD	
9.	Bid. Kelembagaan			0	APBD	
10.	BBTPH Wilayah Banyumas	28	-	28	APBD	
11.	BBTPH Wilayah Semarang	20	0	20	APBD	
12.	BBTPH Wilayah Surakarta	20	3	22	APBD	1 K2
13.	BPTPHBun	6		6		
14.	Balai Benih Tanaman Perkebunan	29	-	29	APBD	
15.	Bapeltan	0	0	0		
16.	BPSB Tegalgondo	4	0	4	APBD	
17.	BIB Jateng			28	APBD	
18.	BPT Jateng			68	APBD	
19.	Bapelvet Jateng			53	APBD	

B. Non ASN (Outsorcing dengan pihak III) berjumlah 46 orang yaitu :

a. Tenaga Kebersihan : 24 orang
b. Driver : 3 orang
c. Pramu bakti : 0 orang
d. Keamanan : 22 orang

Sedangkan untuk sumberdaya sarana prasarana pendukung bagi aparat untuk menunjang pembangunan pertanian dan peternakan masih terbatas terutama bagi aparat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai berikut :

A. Balai Pelatihan Pertanian terletak di Pringsurat Soropadan, Temanggung

Tabel 2.2.

Fasilitas yang tersedia di Balai Pelatihan Pertanian

No	Fasilitas Kantor	Jumlah (Lokal/unit/set)	Keterangan
1	Gedung Administrasi	2	-
2	Asrama	4	174 orang
3	Ruang Makan	3	250 orang
4	Gedung Serbaguna	1	200 orang
5	Gudang alsin	1	-
6	Lab. Pengolah Hasil	1	
7	Lab. Agensia Hayati	1	
8	Kebun (Lahan Praktek) :		-
	- Lahan Kering (tegalan)	12.628 m^2	-
	- Lahan Sawah	8.387 m^2	-
9	Kolam Ikan	3	-
10	Kandang Ternak	1	-
11	Guest House	-	-
12	Tempat Ibadah	1	300 orang
13	Lapangan Olahraga	2	-
14	Rumah Dinas	12	-
15	Ruang Kelas	4	160 orang
16	Cottage	5	10 kamar / 30 orang

Sumber : Balai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan Soropadan, 2022

B. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) berada di Jl Solo – Yogyakarta Km. 15 Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Bangunan yang dimiliki berupa gedung permanen (kantor induk), gedung laboratorium pengujian mutu benih, dan gedung kantor 6 Pos Pengawas Benih (PPB) di 6 wilayah eks Karesidenan yaitu PPB Wilayah Semarang di komplek Tarubudaya Ungaran, PPB Wilayah Pati di Kabupaten Pati, PPB Wilayah Surakarta di Kabupaten Sukoharjo, PPB Wilayah Pekalongan di Kabupaten Pemalang, PPB Wilayah Kedu di Kabupaten Magelang dan PPB Wilayah Banyumas di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.3.

Fasilitas yang tersedia di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

No	Fasilitas Kantor	Jumlah (Luas/unit/set, dll)
1.	Kantor Induk BPSB	1
2.	Laboratorium Pengujian Mutu Benih	1
3.	PPB Wilayah Semarang	1
4.	PPB Wilayah Pati	1
5.	PPB Wilayah Surakarta	1
6.	PPB Wilayah Pekalongan	1
7.	PPB Wilayah Kedu	1
8.	PPB Wilayah Banyumas	1

C. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Semarang

BBTPH Wilayah Semarang terletak di komplek Tarubudaya, dengan wilayah kerja meliputi 16 kebun benih yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota dengan komoditas dan luas lahan yang di usahakan berbeda-beda. Komoditas yang di usahakan antara lain padi, palawija dan hortikultura, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel. 2.4
Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih
BBTPH Wilayah Semarang

No	Kebun Benih	Komoditas	Luas Total (ha)	Luas Produktif (ha)	Lokasi
1	KBP Banyubiru	Padi	6,00	5,00	Banyubiru, Banyubiru Kab Smg
2	KBP Ketitang	Padi	8,20	7,0	Ketitang, Godong, Grobogan
3	KBP Wonoketingal	Padi	10,18	8,50	Wonoketingal, Karanganyar, Demak.
4	KBP Sendang Sikucing	Padi	20,00	18,50	Sendang Sikucing, Rowosari, Kendal
5	KBP Winong	Padi	8,3935	6,50	Winong, Winong Pati
6	KBP Sonobijo	Padi	6,6	6,0	Jl. Blora-Randublatung Km2 Blora
7	KBH Bandungan	Hortikultura	1,13	0,8	Kenteng, Ambarawa, Kab Semarang
8	KBH Karang Duren	Hortikultura	2,52	2,5	Karang Duren, Tengaran, Semarang
9	KBH Kopeng	Hortikultura	0,9	0,6	Kopeng, Getasan, Kab Semarang
10	KBH Sumur Jurang	Hortikultura	3,44	1,5	Sumur Jurang, Gn Pati, Kota Smg
11	KBH Karang Geneng	Hortikultura	12	12,0	Karang Geneng, Gn Pati, Kota Smg
12	KBH Katonsari	Hortikultura	2,77	0,5	Katonsari, Demak Kota, Demak
13	KBH Bulu	Hortikultura	14,6	10,0	Bulu, Bulu, Rembang
14	KBH Sidokerto	Hortikultura	9,7	7,08	Sidokerto, Pati, Pati

15	KBPal Rendole	Palawija	10,25	8,4	Muktiharjo, Margorejo, Pati
16	KBPal Kalinyamat	Padi dan Palawija	15,2	11,7	Margoyoso, Kalinyamatan, Jepara
		Jumlah	131,8	106,59	

Sumber : Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang, 2025

D. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Surakarta

BBTPH Wilayah Surakarta terletak di Jl. Slamet Riyadi 386 Solo dengan wilayah kerja meliputi 16 kebun benih yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota. Komoditas dan luas lahan yang di usahakan antara lain padi, palawija dan hortikultura, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Luas Lahan Produktif dan Penggunaannya di Kebun Benih lingkup BBTPH Wilayah Surakarta

No	Kebun Benih	Komoditas	Luas (ha)	Lokasi
1	KBTPH. Tegalgondo	Padi	6,0	Sraten, Gatak,Sukoharjo
2	KBTPH. Banyudono	Padi	3,0	Kuwiran, Banyudono,Boyolali
3	KBTPH. Tohudan	Hortikultura	4,0	Tohudan, Colomadu, Karanganyar
4	KBTPH. Sonobijo	Padi	12,0	Klaruhan, Palur, Sukoharjo
5	KBTPH. Lawu I	Padi	8,0	Lawu, Nguter, Sukoharjo
6	KBTPH. Masaran	Padi	6,0	Masaran, Sragen
7	KBTPH Tawang-mangu	Hortikultura	2,0	Tawangmangu, Karanganyar
8	KBTPH. Tejomantri	Hortikultura	0,65	Wonorejo, Sukoharjo
9	KBTPH. Pendem	Hortikultura	16,0	Pendem, Mojogedang, Karanganyar
10	KBTPH. Sidoharjo	Palawija	4,0	Kayuloko,Sidoharjo, Wonogiri
11	KBTPH. Payaman	Hortikultura	3,0	Payaman, Magelang
12	KBTPH.. Salaman	Hortikultura	6,0	Menoreh, Salaman, Magelang
13	KBTPH. Sri Widodo	Padi	5,0	Prembun, Kebumen

14	KBTPH. Kaloran	Hortikultura	19,0	Kaloran, Temanggung
15	KBTPH. Sri Makarti	Padi	7,5	Kedu, Temanggung
16	KBH Kledung	Hortikultura	7,0	Kledung, Temanggung
		Jumlah	109,15	

Sumber : Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta, 2025

E. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Banyumas

BBTPH Wilayah Banyumas terletak di Jl. Ahmad Yani 23 A, Purwokerto dengan wilayah kerja meliputi 11 kebun benih tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan rincian yakni :

Tabel 2.6

Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih B2TPH Wilayah

Sumber : Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, 2025

No	Kebun Benih	Komoditas	Luas Lahan (ha)	Lokasi
1	KBTP Maos	Padi	11,58	Jl. Raya Maos No. 462, Cilacap
2	KBTP Petarukan	Padi	12,76	Jl. Raya Kebunsari Petarukan, Pemalang
3	KBTP Gamer	Padi	12,25	Jl. Patimura No. 1 Gamer, Pekalongan
4	KBTPH Kramat	Padi dan Bawang Merah	7,94	Jl. Raya Kramat, Tegal
5	KBTP Bojongsari	Padi	10,00	Jl. Bojongsari, Kembaran, Banyumas
6	KBTP Kalicacing	Palawija	10,11	Desa Kalimandi, Banjarnegara
7	KBTP Harjosari	Palawija	6,72	Jl. Raya Harjosari Kidul, Adiwerna, Tegal
8	KBH Karanganyar	Hortikultura	3,05	Jl. Raya Karanganyar, Kajen, Pekalongan
9	KBH Rowobelang	Hortikultura	47,80	Desa Rowobelang, Batang
10	KBTPH Kandeman	Palawija dan Hortikultura	70,83	Jl. Raya Kandeman Kabupaten Batang
11	KBH Baturaden	Hortikultura	0,35	Jl. Wisata No. 64 Baturraden, Banyumas
		Jumlah	193,39	

F. Balai Benih Tanaman Perkebunan

Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan benih/bibit yang bermutu, Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui UPTD Balai benih Tanaman Perkebunan melakukan kegiatan perbenihan baik berupa pembibitan maupun kebun induk/entres komoditas perkebunan. Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai Kebun Dinas sebanyak 32 kebun.

Tabel 2.7.
Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan

No	Kebun Dinas	Komoditas	Luas (Ha)	Lokasi
1	Adinuso	Teh, Cengkeh,kopi	8,10	Batang
2	Bantarangin	Tebu	9,60	Wonogiri
3	Binangun	Calon KI Kelapa Genjah	3,68	Purbalingga
4	Bulu	Randu,	20,02	Rembang
5	Bulukerto	Kakao, Kelapa	1,32	Wonogiri
6	Giriwarno	Kakao, Kelapa	2,24	Wonogiri
7	Gombong	Teh, Kopi Arabika	8,34	Pemalang
8	Jangglengan	Tebu	18,03	Sukoharjo
9	Jragan	Kopi	0,93	Temanggung
10	Kaliwiro	Calon KI Kelapa Kopyor, Kopi Tebu	9,46	Wonosobo
11	Kaliombo	Tebu, kakao,Kopi	21,00	Rembang
12	Karanganyar	Kopi,Lada, Kakao	6,00	Pekalongan
13	Karanggedong	Teh, Kopi	7,45	Temanggung
14	Karangreja	Kebun Induk Lada, Kelapa	8,39 10,89	Purbalingga Banyumas
15	Limpakuwus	Kopi Robusta Kopi Robusta		
16	Mento	Kopi Arabika	5,00	Temanggung
17	Ngagrong	Kebun Induk Vanili, Lada Cabe Jawa	4,00	Boyolali
18	Ngawen	Kelapa, Bibit Kopi	4,57	Salatiga
19	Noborejo	Kopi, Teh	4,00	Salatiga
20	Pagenteran	Kopi,Kelapa	2,00	Pemalang
21	Redin	Kopi	12,89	Purworejo
22	Sedayu	Kakao,Kelapa	2,40	Wonosobo
23	Selorejo	Kopi,Kakao,Kelapa	1,40	Wonogiri
24	Sidoharjo	Cengkeh, Teh	1,37	Wonogiri
25	Surjo	Teh	1,93	Batang
26	Surojoyo	Entres Kopi,Kebun Induk	6,30	Wonosobo
27	Tanggulrejo	Kakao, Kopi, Kelapa Teh	8,02	Magelang
28	Wanayasa	Tebu, Jambu Mete	5,87	Banjarnegara
29	Wuryantoro		10,52	Wonogiri

No	Kebun Dinas	Komoditas	Luas (Ha)	Lokasi
30	Wonorejo	Calon kebun induk	156,40	Batang
31	Pirikan	kelapa, Tebu, Kakao	0,50	Magelang
32	Watuaji	Kakao	2,50	Jepara
		Karet		
		Jumlah	365,12	

Sumber : Balai Benih Tanaman Perkebunan, 2025

G. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BPTPHBun) berada di komplek Tarubudaya Ungaran. Selain memiliki kantor di komplek Tarubudaya, BPTPH juga memilki Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) yang tersebar di 6 wilayah eks Karesidenan dan 1 Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Perkebunan yaitu:

1. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Semarang; Kabupaten Semarang.
2. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Pati.; Kabupaten Pati.
3. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Surakarta ; Kabupaten Sukoharjo.
4. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Pekalongan; Kabupaten Pemalang.
5. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Kedu ; Kabupaten Temanggung.
6. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit wilayah Banyumas di Banyumas. Kabupaten Banyumas
7. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Perkebunan Kota Salatiga

Tabel 2.8.
Laboratorium Balai Perlindungan Tanaman

No	Fasilitas Kantor	Jumlah (Luas/unit/set, dll)	Keterangan/ Wilayah Kerja
1.	Kantor Induk BPTPH		
2.	LPHP Semarang	Luas Bangunan : 265 m² Luas Lahan : 265 m²	4 KABUPATEN, 2 KOTA dan 92 KECAMATAN : 1. KOTA SEMARANG (16 KECAMATAN) 2. KAB. SEMARANG (19 KECAMATAN) 3. DEMAK (14 KECAMATAN) 4. GROBOGAN (19 KECAMATAN) 5. KENDAL (20 KECAMATAN) 6. KOTA SALATIGA (4 KECAMATAN)
3.	LPHP Pati	Luas Bangunan : 629 m² Luas Lahan : 903 m²	5 KABUPATEN dan 76 KECAMATAN : 1. PATI (21 KECAMATAN) 2. KUDUS (9 KECAMATAN) 3. JEPARA (16 KECAMATAN) 4. BLORA (16 KECAMATAN) 5. REMBANG (14 KECAMATAN)
4.	LPHP Surakarta	Luas Bangunan : 779 m² Luas Lahan : 4020 m²	6 KABUPATEN, 1 KOTA dan 118 KECAMATAN : 1. WONOGIRI (21 KECAMATAN) 2. BOYOLALI (21 KECAMATAN)

No	Fasilitas Kantor	Jumlah (Luas/unit/set, dll)	Keterangan/ Wilayah Kerja
			3. SUKOHARJO (13 KECAMATAN) 4. SRAGEN (20 KECAMATAN) 5. KLATEN (26 KECAMATAN) 6. KARANGANYAR (16 KECAMATAN) 7. KOTA SURAKARTA (1 KECAMATAN)
5.	LPHP Pekalongan	Luas Bangunan : 437 m² Luas Lahan : 978 m² LUAS LAHAN PERCOBAAN : 19.116 m²	5 KABUPATEN, 2 KOTA dan 91 KECAMATAN : 1. BREBES (17 KECAMATAN) 2. TEGAL (19 KECAMATAN) 3. KOTA TEGAL (3 KECAMATAN) 4. PEMALANG (14 KECAMATAN) 5. PEKALONGAN (19 KECAMATAN) 6. KOTA PEKALONGAN (4 KECAMATAN) 7. BATANG (15 KECAMATAN)
6.	LPHP Kedu	Luas Bangunan : 629 m² Luas Lahan : 903 m²	5 KABUPATEN, 1 KOTA dan 101 KECAMATAN : 1. KOTA MAGELANG (3 KECAMATAN) 2. MAGELANG (21 KECAMATAN) 3. WONOSOBO (15 KECAMATAN) 4. TEMANGGUNG (20 KECAMATAN) 5. PURWOREJO (16 KECAMATAN) 6. KEBUMEN (26 KECAMATAN)
7.	LPHP Banyumas	Luas Bangunan : 629 m² Luas Lahan : 903 m²	4 KABUPATEN dan 87 KECAMATAN : 1. CILACAP (24 KECAMATAN) 2. PURBALINGGA (18 KECAMATAN) 3. BANJARNEGARA (18 KECAMATAN) 4. BANYUMAS (27 KECAMATAN)

Sumber : BPTPHP, 2025

H. Balai Inseminasi Buatan jawa Tengah

Fasilitas yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9.
Fasilitas Balai Inseminasi Buatan

No	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
1	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERBUKA SEMI PERMANEN	-	BATURSARI,BATURSARI, MRANGGEN, KAB. DEMAK	RUANG PERTEMUAN BATURSARI
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN	35	JL. MT. HARYONO NO 53 A ,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BANGUNAN DAN INSTALASI BIOSECURITY
3	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN	-	JL MT HARYONO NO 53 A ,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BANGUNAN TEMPAT PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR
4	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	96	KALIREJO,KALIREJO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Gedung Staff pemeliharaan)

No	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
5	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	105	Sidomulyo,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Gedung staff prodistar)
6	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	312	Sidomulyo,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Gedung Induk BIB)
7	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	159	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	Jalan Lingkungan BIB
8	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	28	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Gudang pupuk)
9	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	40	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Gudang)
10	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	200	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Gudang rumput kering)
11	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM.BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM PERMANEN	162	Sidomulyo,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Gedung Laboratorium)
12	RUMAH NEGARA GOLONGAN II.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	36	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Rumah Dinas)
13	RUMAH NEGARA GOLONGAN II.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	36	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Rumah Dinas)
14	RUMAH NEGARA GOLONGAN II.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	36	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Rumah Dinas)
15	RUMAH NEGARA GOLONGAN II.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	36	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Rumah Dinas)
16	RUMAH NEGARA GOLONGAN II.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	36	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Rumah Dinas)

No	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
17	RUMAH NEGARA GOLONGAN II.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	36	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Rumah Dinas)
18	RUMAH NEGARA GOLONGAN II.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	36	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Rumah Dinas)
19	RUMAH NEGARA GOLONGAN II.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	36	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Rumah Dinas)
20	RUMAH NEGARA GOLONGAN II.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	36	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Rumah Dinas)
21	ASRAMA.ASRAMA PERMANEN	310	Sidomulyo,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Gedung Asrama)
22	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	60	Sidomulyo,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Rumah Dinas)
23	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	144	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Penampungan)
24	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	12	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Bak Penampungan I)
25	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	28	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Bak Penampungan II)
26	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI.BANGUNAN GEDUNG INSTALASI.BANGUNAN GEDUNG INSTALASI PERMANEN	16	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Pembuatan Biogas dan Peralatan)
27	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	140	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Gudang dan garasi kendaraan)
28	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	48	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Kandang Kambing III)

No	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	80	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Kandang Sapi I X. A)
30	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	48	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Kandang Sapi I X. b)
31	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	80	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Kandang Sapi I X. c)
32	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	72	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Kandang Sapi I X. d)
33	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	60	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Kandang Sapi I X. e)
34	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	60	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Kandang Sapi I X. f)
35	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	16	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Kandang karantina)
36	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	35	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	KANDANG HEWAN SAPI BIB Ungaran
37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN	144	Sidomulyo,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Gedung Perawatan)
38	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	42	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Kandang Kambing I)

No	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
39	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	40	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Kandang Kambing II)
40	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	32	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	Bangunan UPTD (Door Lab)
41	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	50	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Kandang Kambing)
42	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	150	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Kandang Umbaran Kambing)
43	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA.GEDUNG POS JAGA PERMANEN	12	Sidomulyo,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BIB UNGARAN (Pos Jaga)
44	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN	45	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	Unloading dan Bull Crush BIB
45	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN	36	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	Pondasi Instalasi Nitrogen Cair
46	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	375	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	Tempat Jemur HPT
47	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	33	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	Pembuatan Gangway IKHS (BIB)
48	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	66	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	pavingisasi Excercise kambing (BIB)
49	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	44	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	Pavingisasi Areal IKHS (BIB)

No	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
50	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI.TUGU /TANDA BATAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN	120	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO , UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	Bangunan Gedung Tempat Kerja.Bangunan Kandang Hewan/Ternak.Lain-lain Pagar keliling kandang kambing
51	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA.GEDUNG POS JAGA PERMANEN	16	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	POS JAGA LAHAN RUMPUT
52	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	4	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	LOKER KANDANG KAMBING BIB Sidomulyo
53	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	168	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	JOGING TRACK KANDANG KAMBING BIB Sidomulyo
54	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	310	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	KANOPI PENEDUH JOGGING TRACK BIB Sidomulyo
55	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	2	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	KANDANG JEPIT BIB Sidomulyo
56	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI.TUGU /TANDA BATAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN	137	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	Pagar Keliling Belakang BIB SidomulyoBIB Sidomulyo
57	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI.TUGU /TANDA BATAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN	24	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	Pagar Pengaman tanki N2cairBIB Ungaran
58	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI.LAIN-LAIN	55	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	CANOPY PENEDUH N2 CAIR
59	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN.BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN	400	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	GEDUNG PERTEMUAN
60	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	22	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	KANDANG KARANTINA
61	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	150	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	KANDANG PEMBESARAN

No	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
62	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK SEMI PERMANEN	14	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BANGUNAN BIO SECURITY
63	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	202	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	GUDANG PAKAN
64	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	24	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	GUDANG PAKAN KAMBING
65	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR.BANGUNAN BENGKEL/HANGGAR PERMANEN	49	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BENGKEL TRAKTOR DAN CHOPPER
66	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL.GEDUNG GARASI/POOL PERMANEN	73	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	GARASI SEPEDA MOTOR
67	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL.GEDUNG GARASI/POOL PERMANEN	96	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	GARASI MOBIL
68	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK SEMI PERMANEN	56	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	KANDANG UMBARAN DAN PAGAR
69	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	112	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	PAGAR KANDANG KARANTINA
70	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI.TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN	48	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BANGUNAN NAMA KANTOR BALAI
71	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	12	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	RUMAH GENSET
72	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI.TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN	178	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	PAGAR KELILING LAHAN
73	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	93	JL. MT HARYONO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	PEMBUATAN PAGAR LAHAN BELAKANG KANDANG KAMBING BIB

No	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
74	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	270	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	GEDUNG BANGUNAN DEPO SEMEN BEKU
75	BANGUNAN TERBUKA.SELASAR	75	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	SELASAR DEPO N2 CAIR BIB
76	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN	298	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	PAGAR KELILING BALAI INSEMINASI BUATAN (BIB)
77	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	96	JL. MT. HARYONO KELURAHAN SIDOMULYO UNGARAN TIMUR,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	LINE BULL
78	BANGUNAN PARKIR.BANGUNAN PARKIR TERTUTUP PERMANEN	96	JL. MT. HARYONO KELURAHAN SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	TEMPAT PARKIR MOBIL

Sumber : BIB Jawa Tengah, 2025

I. Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah

Fasilitas yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10.
Fasilitas Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah

No	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
1	BANGUNAN TERBUKA.HALAMAN PAVING	222	SUMBERJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	(PENGERASAN AREA CLOUSE HOUSE) PAVINGISASI JALAN
2	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN PEMBESAR IKAN	63	SUMBEREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	EMBNG SUMBEREJO
3	RUMAH NEGARA GOLONGAN II.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	200	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BPBTR UNGARAN (Gudang pabrik pakan)
4	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	24	Sidomukti Kopeng,KOPENG, GETASAN, KAB. SEMARANG	SATKER KOPENG (Kantor)
5	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	504	Sidomukti Kopeng Kab. Semarang,KOPENG, GETASAN, KAB. SEMARANG	SATKER KOPENG (Kandang Ternak)

No	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
6	RUMAH NEGARA GOLONGAN II.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	32	Sidomukti Kopeng,KOPENG, GETASAN, KAB. SEMARANG	SATKER KOPENG (Rumah Dinas)
7	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA.GEDUNG POS JAGA PERMANEN	9	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	Pos Jaga Lingkungan Sidomulyo
8	RUMAH NEGARA GOLONGAN II.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	20	Sidomukti Kopeng Kab. Semarang,KOPENG, GETASAN, KAB. SEMARANG	Gudang Pakan (Kopeng)
9	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	20	Ds.Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	Pembuatan Canopy laboratorium (BPBTR)
10	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI.TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN	4	Sidomukti Kopeng Kab. Semarang,KOPENG, GETASAN, KAB. SEMARANG	Bangunan Gedung Tempat Kerja.Bangunan Gedung Kantor.Lain-lain Papan Nama Satker Kopeng
11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN	120	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	Sidomulyo
12	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL.GEDUNG GARASI/POOL PERMANEN	45	Sidomulyo Ungaran,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BPBT RUMINANSIA
13	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI.TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN	34	DS.SIDOMULYO KEL SIDOMULYO UNGARAN TIMUR,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	BANGUNAN PINTU DAN GAPURO
14	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	750	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	PAGAR KELILING PABRIK PAKAN
15	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI.TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN	216	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	PAGAR KELILING DAN TEMPAT PARKIR LAB. PAKAN
16	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	120	Soropadan Temanggung,SOROPADAN, PRINGSURAT, KAB. TEMANGGUNG	Stand Soropadan (Kandang Pamer)
17	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	256	Soropadan Kab. Temanggung,SOROPADAN, PRINGSURAT, KAB. TEMANGGUNG	Bangunan UPTD (Kandang stand Soropadan)

No	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
18	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA.GEDUNG POS JAGA PERMANEN	21	Soropadan Temanggung,SOROPADAN, PRINGSURAT, KAB. TEMANGGUNG	Rumah Jaga Soropadan
19	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	228	SOROPADAN TEMANGGUNG ,SOROPADAN, PRINGSURAT, KAB. TEMANGGUNG	BANGUNAN/RUANGAN UNTUK PAMERAN
20	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	48	BBPTT SUMBEREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	GUDANG ARSIP SATKER SUMBEREJO KENDAL
21	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM.BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM PERMANEN	45	BBPTT SUMBERREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	BANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN TERNAK
22	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN	32	BBPTT SUMBEREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	GERBANG UTAMA. (CV. MICHRILEO)
23	ASRAMA.ASRAMA PERMANEN	160	BBPTT SUMBEREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	ASRAMA. BBPTT SUMBEREJO KENDAL
24	SARANA PELENGKAP.SARANA PELENGKAP PERMANEN	50	BBPTT SUMBERREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	SALURAN DRAINASE 50M
25	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA SEMI PERMANEN	39	SUMBEREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	PERANGKAT KOMPUTER PENDUKUNG RECORDING TERNAK
26	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.RUMAH PANEL	36	BBPTT SUMBEREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	RUMAH INCENERATOR
27	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	148	BBPTT SUMBEREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	GUDANG PAKAN
28	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN.BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN	120	BBPTT SUMBEREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	GEDUNG PERTEMUAN BALAI
29	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA.GEDUNG POS JAGA PERMANEN	6	TAMAN TERNAK SUMBEREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	POS JAGA

No	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
30	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	1.500	TAMAN TERNAK SUMBEREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	KANDANG AYAM CLOSE HOUSE
31	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	1.500	TAMAN TERNAK SUMBEREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	KANDANG AYAM CLOSE HOUSE
32	BANGUNAN FASILITAS UMUM.BANGUNAN TEMPAT PARKIR	161	BBPTT SUMBEREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	TEMPAT PARKIR BALAI
33	PAGAR.PAGAR PERMANEN	261	BBPTT SUMBEREJO KENDAL,SUMBEREJO, KALIWUNGU, KAB. KENDAL	PAGAR KELILING

Sumber : Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah, 2025

J. Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah

Fasilitas yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Fasilitas Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
1	BANGUNAN PARKIR.BANGUNAN PARKIR TERBUKA PERMANEN	45	SIDOMULYO UNGARAN,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	KONSTRUKSI PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR BAVET SEMARANG
2	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA.GEDUNG POS JAGA PERMANEN	240	Sidomulyo,SIDOMULYO, UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG	KANTOR INDUK BAVET SEMARANG
3	BANGUNAN KESEHATAN.BANGUNAN KLINIK/PUSKESMAS	140	Majapahit Semarang,GAYAMSARI, GAYAMSARI, KOTA SEMARANG	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium
4	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA.GEDUNG POS JAGA PERMANEN	145	Desa Bawen Kec Bawen Kab Semarang,BAWEN, BAWEN, KAB. SEMARANG	KLINIK HEWAN BAWEN
5	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM.BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM PERMANEN	36	BOYOLALI,BANARAN, BOYOLALI, KAB. BOYOLALI	RENOVASI/PENATAAN RUANG PERTEMUAN BAVET BOYOLALI

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Luas Lantai (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
6	BANGUNAN GEDUNG KANTOR.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	150	Desa BANARAN Kec. Boyolali,BANARAN, BOYOLALI, KAB. BOYOLALI	BAPEL KESMAVET BOYOLALI (Gedung Kantor Bapel Kesmavet)
7	RUMAH NEGARA GOLONGAN II.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	42	Desa : Banaran Kec. Boyolali Kab. Boyolali,WINONG 3 PENGGUNG, BOYOLALI, KAB. BOYOLALI	BAPEL KESMAVET BOYOLALI (Rumah Dinas)
8	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI.TUGU /TANDA BATAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN	9	Kab. Boyolali,WINONG 3 PENGGUNG, BOYOLALI, KAB. BOYOLALI	Bangunan Kandang Hewan Lain-lainPagar VBC
9	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI.TUGU /TANDA BATAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN	89	Kab. Boyolali,WINONG 3 PENGGUNG, BOYOLALI, KAB. BOYOLALI	Pagar Keliling dan Pintu Gerbang Bapelkesmavet
10	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL.LAIN-LAIN	36	BOYOLALI,WINONG 3 PENGGUNG, BOYOLALI, KAB. BOYOLALI	BANGUNAN SARANA PARKIR
11	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI.TUGU /TANDA BATAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN	272	BOYOLALI,WINONG 3 PENGGUNG, BOYOLALI, KAB. BOYOLALI	PAGAR KELILING BAPELKESMAVET BOYOLALI
12	PAGAR.PAGAR PERMANEN	85	BALAI VETERINER BOYOLALI,WINONG 3 PENGGUNG, BOYOLALI, KAB. BOYOLALI	PAGAR BELAKANG KANTOR BALAI VETERINER BOYOLALI
13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA.GEDUNG POS JAGA PERMANEN	160	TAWANGMANGU KARANGANYAR,GONDOSULI, TAWANGMANGU, KAB. KARANGANYAR	PEMBANGUNAN PLLT TAWANGMANGU

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah menggambarkan kondisi umum kinerja yang disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan selama lima tahun terakhir. Selengkapnya sebagai berikut

Tabel 2.12

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun /Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun /Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%				1,10	1,12	1,12	1,15	0,13	1,10	1,10	1,12	1,12	1,17	100,00 %	98,21 %	100,00 %	97,39 %	900 %
2	Presentase Peningkatan Produksi Padi	%				0,70	0,70	0,70	0,70	0,20	-1,72	1,36	-2,72	-2,91	-2,12	N/A	194,28 %	N/A	N/A	N/A
3	Presentase Peningkatan Produksi Jagung	%				N/A	N/A	N/A	N/A	0,20	N/A	N/A	N/A	N/A	0,11	N/A	N/A	N/A	N/A	55%
4	Presentase Peningkatan Produksi Kedelai	%				2,1	2,1	2,1	2,1	0,20	-0,32	0,07	0,3	0,42	-0,14	N/A	3,33	14,28	20	N/A
5	Presentase Peningkatan Produksi Bawang Merah	%				3,80	3,80	3,80	3,80	2,50	0,27	-0,08	-0,01	-0,14	0,27	7,1	N/A	N/A	N/A	10,8
6	Presentase Peningkatan Produksi Cabe	%				3,8	3,8	3,8	3,8	1,50	0,01	0,02	0,10	0,27	-0,07	0,26%	0,5%	2,63%	7,10%	N/A
7	Presentase Peningkatan Produksi Durian	%				N/A	N/A	N/A	N/A	2,50	N/A	N/A	N/A	N/A	-0,28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Presentase Peningkatan Produksi Jahe	%				N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	-0,14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Presentase Peningkatan Produksi Melati	%				N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	-0,25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun /Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun /Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	Persentase Peningkatan Produksi Tebu	%				0,50	0,50	0,50	0,50	0,009	-0,17	0,09	0,4	0,03	0,03	N/A	36	6	6	333,3
11	Presentase Peningkatan Produksi Kelapa	%				0,50	0,50	0,50	0,50	0,009	0,03	-0,02	-0,06	-0,04	-0,08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Presentase Peningkatan Produksi Kopi	%				2,5	2,5	2,5	2,5	0,009	0,08	0,02	-0,04	0,05	-0,01	3,2%	0,8	N/A	2%	N/A
13	NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Angka				N/A	N/A	N/A	N/A	108,56	N/A	N/A	N/A	N/A	116,86	N/A	N/A	N/A	N/A	107,65 %
14	NTP Tanaman Pangan	Angka				N/A	N/A	N/A	N/A	105,19	N/A	N/A	N/A	N/A	115,29	N/A	N/A	N/A	N/A	109,60 %
15	NTP Hortikultura	Angka				N/A	N/A	N/A	N/A	108,11	N/A	N/A	N/A	N/A	117,28	N/A	N/A	N/A	N/A	108,48
16	NTP Perkebunan	Angka				N/A	N/A	N/A	N/A	100,59	N/A	N/A	N/A	N/A	118,07	N/A	N/A	N/A	N/A	117,38 %
17	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	Angka				5,33	5,33	5,5	5,55	3	-4,98	9,8	2,08	3,48	1,09	-93,43%	103,19 %	37,82 %	62,70	36,33 %
18	Produksi daging	Kg				325.436.369	340.041.606	355.690.105	375.382.386	457.685.292	403.605.002	395.212.501	457.456.564	479.642.194	930.177.944	132,25%	116,22 %	101,85%	127,77 %	203,24 %
19	Produksi susu	Kg				101.561.631	101.663.192	101.764.855	101.866.620	93.864.946	103.439.376	102.508.639	93.793.157	76.596.010	76.113.244	106,43%	100,83 %	98,59%	75,19 %	81,09 %
20	Produksi telur	Kg				315.144.165	315.686.596	320.610.319	325.083.370	344.872.727	335.396.767	328.156.975	344.700.377	349.712.764	902.097.949	102,98%	103,95 %	103,89%	107,57 %	120,47 %
21	Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka				NA	NA	NA	NA	100,5	NA	NA	NA	NA	98,93	NA	NA	NA	NA	98,44 %
22	Persentase nilai tambah produk hasil ternak	%				NA	NA	NA	NA	4,5	NA	NA	NA	NA	8,57	NA	NA	NA	NA	190,44 %
23	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	Indeks Manajemen Risiko	Angka				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Berdasarkan tabel 2.12 dapat diketahui bahwa kinerja tujuan laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan pada tahun 2024 telah melebihi target dengan capaian sebesar 1,17%. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan sektor pertanian di Jawa Tengah dikategorikan baik karena masih menjadi salah satu sektor andalan dan penggerak PDRB, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan. Beberapa langkah telah dilakukan untuk menunjang pencapaian tersebut diantaranya melalui pengaturan jadwal droping bantuan benih dan jadwal tanam, penggunaan benih unggul bersertifikat, pemanfaatan sarana irigasi dan perpompaan untuk menunjang ketersediaan air, fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi bagi petani yang mengalami gagal panen padi, dan gerakan pengendalian OPT secara terpadu. Sedangkan kinerja laju pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan pada tahun 2024 belum dapat mencapai target dengan capaian sebesar 1,09% dari target 3%, dengan tingkat capaian 36,33%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu fluktuasi harga bahan pakan ternak terutama jagung yang mempengaruhi harga produk peternakan khususnya telur dan daging ayam ras, serta usaha peternakan yang bersifat *subsistence* (usaha sampingan) atau sebagai tabungan sehingga belum mementingan profit/keuntungan dari usahanya.

Hasil kinerja sasaran persentase peningkatan produksi padi cenderung mengalami penurunan dikarenakan adanya gagal panen akibat bencana banjir dan kekeringan, serta serangan OPT yang menghambat perkembangan tanaman, sedangkan persentase peningkatan produksi kedelai juga mengalami penurunan dipengaruhi oleh rendahnya minat petani untuk budidaya kedelai disebabkan masih bergantung pada bantuan dan belum adanya jaminan harga (harga relatif rendah). Untuk kinerja indikator persentase peningkatan produksi jagung meningkat pada tahun 2024 ini dikarenakan adanya peningkatan luas tanam yang ditunjang oleh pemanfaatan sarana irigasi untuk menunjang ketersediaan air, serta permintaan jagung yang semakin meningkat terutama untuk pakan ternak. Selanjutnya untuk kinerja indikator persentase peningkatan produksi bawang merah cenderung meningkat dikarenakan meningkatnya minat petani dalam menjaga kualitas produk untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, sedangkan untuk indikator persentase peningkatan produksi cabe justru cenderung menurun di Tahun 2024 dikarenakan adanya penurunan produksi akibat bencana banjir pada bulan Januari-Februari 2024 di beberapa wilayah sentra produksi dan kekeringan yang menyebabkan mundurnya jadwal tanam akibat keterbatasan air. Untuk kinerja sektor perkebunan, persentase peningkatan produksi kelapa cenderung menurun disebabkan beberapa tanaman sudah tua dan tidak menghasilkan. Adapun kinerja tujuan NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada tahun 2024 menunjukkan hasil sebesar 116,88 dengan capaian 107,66%. Kinerja tujuan tersebut dipengaruhi oleh capaian indikator NTP tanaman pangan sebesar 115,29 (109,60%), NTP hortikultura sebesar 117,28 (108,48%), dan NTP perkebunan rakyat sebesar 118,07 (117,38%).

Sedangkan kinerja Capaian kinerja sasaran tercapainya produksi daging tahun 2024 sebesar 930.177.944 kg (203,23%), produksi telur sebesar 902.097.949 kg (261,57%), dan produksi susu sebesar 76.113.244 kg (81,09%). Capaian produksi daging dan telur melebihi target yang ditetapkan dikarenakan perubahan kebijakan penggunaan data pada komoditas ayam ras pedaging dan petelur yang semula menggunakan data dari kabupaten/kota menjadi menggunakan data laporan perusahaan melalui sistem perunggasan nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI. Perubahan kebijakan penggunaan data ini disebabkan adanya kesulitan kabupaten/kota dalam memperoleh data yang valid dari perusahaan perunggasan yang ada di wilayah masing-masing. Data populasi unggas mempunyai peran penting dalam penghitungan proyeksi produksi daging dan telur. Capaian produksi susu belum mencapai target merupakan dampak dari wabah PMK yang terjadi mulai tahun 2022. Wabah menyebabkan populasi ternak menurun karena adanya kematian ternak serta banyak peternak yang menjual ternaknya, sedangkan ternak yang masih dapat diselamatkan mengalami penurunan produksi susu mencapai 30-50%. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui kegiatan vaksinasi, dan pengobatan dan peningkatan pengawasan lalu lintas hewan. Tahun 2024 telah dilakukan vaksinasi terhadap jumlah ternak sehat yang telah dilakukan vaksinasi PMK terhadap sejumlah sebanyak 127.150 ekor dan pengobatan terhadap sejumlah sebanyak 716.834 ekor. dan peningkatan pengawasan lalu lintas ternak.

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Perkebunan

NO	URAIAN	PAGU INDIKATIF RENSTRA PD pada tahun (Rp.000)					APBD PADA TAHUN (Rp. 000)					REALISASI ANGGARAN (Rp. 000)					RASIO ANGGARAN (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan						34.356.340.000	11.312.000.000	14.394.105.000	14.520.406.000	16.550.000.000	13.549.457.975	12.259.785.281	13.390.977.383	12.630.796.518	10.115.718.106	39,44	108,37	93,03	86,98	61,30	-10.36	-5,06
2	Belanja						244.943.303.000	211.044.631.000	193.516.027.000	224.272.214.000	245.175.624.000	220.530.711.844	194.076.538.371	184.792.082.862	213.205.112.087	232.877.055.572	95,52	91, 96	95,49	95,07	94,98	0,01	1,11
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	URAIAN	PAGU INDIKATIF RENSTRA PD pada tahun (Rp.000)					APBD PADA TAHUN (Rp. 000)					REALISASI ANGGARAN (Rp. 000)					RASIO ANGGARAN (%)					Rata-rata Pertumbuhan(%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan	8.100.000	7.172.565	7.735.950	9.250.000	9.750.000	8.100.000	7.172.565	7.735.950	9.250.000	9.750.000	8.430.891,175	8.453.781,113	7.766.413,7155	9.250.000	7.115.198.137	104,09	117,86	100,39	100,00	100,00	0,05	-0,03
2	Belanja	77.340.724	91.212.985	124.872.638	129.866.803	123.190.554	77.340.724	91,212,985	124,872,638	129,845,470	123,190,554	74.256.318,394	81.648.465	116.214.044	123.082.256	117.379.848	96,01	89,51	93,07	94,79	95,28	13,4	29,55
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data-data terkait dengan kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi jawa Tengah, sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Produksi Komoditas Pertanian dan Peternakan Tahun 2024-2026

No	Komoditas	Satuan	Target			Realisasi		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Padi	Ton	9.594.280	9.287.932	9.380.811	8.891.297	8.614.010*	NA
2	Jagung	Ton	3.5576.577	3.287.481	3.301.024	3.282.384	3.198.696*	NA
3	Kedelai	Ton	52.657	52.762	52.790	74.956	18.311*	NA
4	Bawang merah	Ton	515.000	610.936	617.015	607.897	343.487,66**	NA
5	Cabe	Ton	341.000	452.122	456.621	449.873	262.247,41**	NA
6	Tebu	Ton	2.554.553	3.670.565	3.674.236	3.771.555	1.829.192,22***	NA
7	Kopi	Ton	25.927	26.786	3.670.565	26.507,79	16.176,53***	NA
8	Kelapa	Ton	166.687	166.871	166.955	139.079,09	89.291,90***	NA
9	Daging	Ton	457.685,292	457.959,903	458.198,043	930.177,944	255.055.971**	NA
10	Susu	Ton	93.864,946	94.005,743	94.193,754	76.113,244	45.843.736**	NA
11	Telur	Ton	344.872,727	345.079,651	345.259,092	902.097,949	173.112.608**	NA

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, 2025
Ket : Realisasi Produksi Padi dan Jagung adalah angka KSA BPS

**) Potensi produksi sampai dengan Oktober 2025 (KSA BPS)*
***) Potensi produksi sampai dengan Juli 2025*
****) Potensi produksi sampai dengan Agustus 2025*

Berdasarkan pada tabel 2.14 dapat diketahui bahwa capaian produksi pada tahun 2024 terdapat beberapa komoditas yang tidak memenuhi target yaitu produksi padi, jagung dan kelapa. Capaian produksi padi tidak terpenuhi dikarenakan adanya penurunan peningkatan produksi padi sebesar 233.818 ton dikarenakan gagal panen akibat bencana banjir pada bulan Januari-Februari 2024 di beberapa wilayah sentra produksi sebesar 18.203 ha dan kekeringan yang menghambat perkembangan tanaman akibat keterbatasan air sebesar 11.536 ha, serta serangan OPT sebesar 291,54 ha. Capaian produksi jagung juga tidak tercapai dan mengalami penurunan dikarenakan adanya peningkatan produksi jagung sebesar 33.280 ton dikarenakan adanya peningkatan luas tanam yang ditunjang oleh pemanfaatan sarana irigasi untuk menunjang ketersediaan air. Selain itu, capaian produksi kelapa tidak memenuhi target disebabkan adanya penurunan produktivitas pada tanaman kelapa karena umur tanaman sudah tua. Pada sektor peternakan capaian produksi daging dan telur melebihi target, sedangkan produksi susu tidak memenuhi target produksi. Capaian produksi susu belum mencapai target merupakan dampak dari wabah PMK yang terjadi mulai tahun 2022. Wabah menyebabkan populasi ternak menurun karena adanya kematian ternak serta banyak peternak yang menjual ternaknya, sedangkan ternak yang masih dapat diselamatkan mengalami penurunan produksi susu mencapai 30-50%.

Terkait dengan hal tersebut diatas, telah dilakukan beberapa upaya yaitu penambahan luas tanam dengan pengaturan jadwal droping bantuan benih dan jadwal tanam pada lokasi dengan provitas rendah, pemanfaatan sarana irigasi dan perpompaan untuk menunjang ketersediaan air ketika kekeringan dan membuang air ketika terjadi banjir, serta fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi bagi petani yang mengalami gagal panen dan gerakan pengendalian OPT secara terpadu. Sedangkan untuk memulihkan produksi susu dilakukan berbagai upaya selain pengobatan yaitu perbaikan pakan untuk mengembalikan kemampuan reproduksi ternak.

Adapun capaian produksi tahun 2025 yang diperkirakan tidak akan tercapai yaitu produksi komoditas kedelai. Produksi kedelai diprediksikan tidak akan tercapai dari target 52.762 ton dengan prognosa produksi sampai akhir tahun 2025 sebesar 24.403 ton. Hal ini dikarenakan adanya alih komoditas ke tanaman padi yang menjadi prioritas pada program swasembada pangan didukung dengan kondisi iklim kemarau basah dan harga gabah yang baik. Upaya yang akan dilakukan yaitu dengan pemberian insentif bantuan benih kedelai sebanyak 10 ton seluas 200 ha yang didroping pada bulan September. Untuk capaian produksi susu juga diperkirakan tidak dapat memenuhi target pada tahun 2025. Upaya yang akan dilakukan yaitu dengan penambahan indukan sapi perah berkualitas dan peningkatan ketersediaan pakan berkualitas di Jawa Tengah.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan internal yang masih dihadapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, diantaranya adalah : 1). Masih terbatasnya jumlah ASN sesuai dengan kompetensi yang diperlukan; dan 2) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan; 3) Belum optimalnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah. Berkaitan dengan produksi pertanian dan peternakan, permasalahan mendasar yang dihadapi yaitu : 1) belum optimalnya produktivitas pertanian; 2). Belum optimalnya produksi komoditas utama peternakan; 3). Kesejahteraan pelaku usaha pertanian dan peternakan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan pembangunan pertanian dan peternakan adalah :

1. Peningkatan produksi pertanian dengan peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman. Rata-rata untuk Indeks Pertanaman (IP) Padi di Jawa Tengah selama 5 (lima) Tahun terakhir (2019-2024) sebesar 1,79 dan produktivitas rata-rata ..... ton/ha. Perlu dilakukan perbaikan sistem budidaya dan pola tanaman sehingga terjadi peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas. Disamping itu juga dilakukan pemanfaatan lahan-lahan yang belum optimal, peningkatan pertanaman, pengendalian organisme pengganggu, mitigasi dan antisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI) serta perlindungan terhadap petani/peternak pada saat gagal panen;
2. Mengurangi Penggunaan pupuk an-organik dan pestisida yang berlebihan. Perlu dilakukan penyuluhan dan pendampingan kepada petani berkaitan dengan penggunaan pupuk organik dan pestisida non kimia untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas lahan;
3. Ketersediaan air pertanian;
4. Modernisasi pertanian dengan pemanfaatan alat mesin pertanian dan penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat;
5. Menurunnya produksi susu dikarenakan adanya beberapa permasalahan, seperti efek munculnya penyakit PMK dan LSD pada Tahun 2022 yang berpengaruh pada penurunan produksi susu pada ternak perah dan sulitnya mengembalikan performans ternak perah pasca wabah PMK dan LSD;
6. Keterbatasan ketersediaan sumberdaya dan akses modal. Akses permodalan dapat dilakukan melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan, stimulan subisidi suku bunga pinjaman usahatani dan pembiayaan lainnya;
7. Semakin berkurangnya SDM pelaku usaha pertanian dan peternakan. Menumbuhkan minat tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian dan peternakan dengan pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada petani-petani muda/milenial.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pertanian dan peternakan di Jawa Tengah diantaranya sebagai berikut :

1. Komoditas pertanian dan peternakan merupakan komoditas strategis kebutuhan pangan utama masyarakat.
2. Jawa Tengah merupakan provinsi sentra dan penumpu pangan nasional.
3. Peluang investasi dibidang agribisnis cukup besar. Hal ini menjadi daya tarik bagi usaha di sektor pertanian termasuk petani muda/milenial.
4. Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/kelompok tani dengan pengusaha/produsen.

Selengkapnya, permasalahan yang dihadapi dalam pelayananan Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.15
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya produksi pertanian	- Masih rendahnya Indeks Pertanaman (dengan kondisi IP tahun 2024 adalah 1,82)	- Masih terbatasnya akses dan pemanfaatan sarana prasarana dan teknologi untuk percepatan tanam - Menurunya luas lahan pertanian sebesar 62.193 ha dari data tahun 2019 seluas 1.049.661 ha menjadi 987.468 ha di tahun 2024. - Terbatasnya sumber daya air pertanian - Belum optimalnya pemanfaatan lahan marginal untuk budidaya pertanian
		- Masih rendahnya produktivitas tanaman	- Menurunnya kualitas lahan pertanian diantaranya karena pemupukan yang tidak berimbang dan pola tanam - Masih rendahnya penerapan *Good Agriculture Practice* (GAP) pertanian berkelanjutan - Masih rendahnya *good handling process* (GHP) yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas panen - Terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan benih unggul bersertifikat dikarenakan belum maksimalnya pemanfaatan potensi Balai benih dan terbatasnya penangkar penyedia benih unggul - Masih adanya potensi gagal panen karena tingginya serangan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim
		- Belum optimalnya kelembagaan petani dan kapasitas/ kompetensi SDM	- Kurangnya SDM pelaku usaha Pertanian karena Rendahnya minat menjadi pelaku usah sektor pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pelaku usaha pertanian	- Masih rendahnya kelembagaan ekonomi petani - Rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku usaha pertanian terutama dalam pemanfaatan teknologi - Terbatasnya akses pembiayaan terutama berkaitan dengan permodalan usaha pertanian - Harga komoditas pertanian cenderung tidak stabil
2	Belum optimalnya produksi ternak	- Menurunnya produktivitas ternak	Belum optimalnya produktivitas ternak dikarenakan belum optimalnya pembibitan ternak, kurangnya ketersediaan pakan berkualitas, dan belum optimalnya manajemen usaha peternakan
		- Menurunya status kesehatan hewan	- Meninggkatnya ancaman penyakit hewan - Belum optimalnya pengawasan kesehatan hewan - Belum optimalnya pelaksanaan manajemen keswan
		- Belum optimalnya penjaminan keamanan produk hewan (pangan dan non pangan)	- Rendahnya penerapan *higiene sanitasi* pada pelaku usaha produk hewan - Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk sertifikasi produk - Lemahnya pengawasan keamanan produk hewan
3	Belum optimalnya Tata kelola Pemerintahan	- Belum optimalnya pelayanan publik yang efektif dan adaptif	- Kurangnya kualitas SDM aparatur sebagai pelayanan publik yang berintegritas - Kurangnya pemanfaatan teknologi - Kurangnya sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan

2.5. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan pertanian dan peternakan dalam 5 (lima) tahun ke depan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan perangkat daerah dan isu-isu lingkungan strategis lainnya baik global, nasional, maupun regional serta KLHS dan hasil penjaringan masukan *stakeholders* terkait. Selengkapnya perumusan isu strategis pembangunan pertanian dan peternakan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.16
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevam dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Derah			Isu Strategis Perengkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional	- Belum optimalnya produksi pertanian - Belum optimalnya produksi ternak	Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi masih relatif rendah	- Pangan dan Gizi - Perubahan Iklim	- Rendahnya produktivitas - Swasembada pangan - Transformasi Tata kelola pemerintahan	- Ketahanan pangan yang berkelanjutan - Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas	- Ketersediaan pangan antar waktu antar wilayah - Kesejahteraan pelaku usaha pertanian - Tata Kelola pelayanan perangkat daerah yang adaptif, dinamis dan kolaboratif

Mendasarkan uraian diatas, maka isu strategis pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Produksi Komoditas Pertanian Antar Waktu Antar Wilayah

   Isu pangan menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah dimana pangan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pangan juga berdampak pada inflasi dengan fluktuasi harga yang sering memberikan gejolak di masyarakat serta berpengaruh pada tingkat pendapatan petani. Isu pangan menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah dimana pangan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pangan juga berdampak pada inflasi dengan fluktuasi harga yang sering memberikan gejolak di masyarakat serta berpengaruh pada tingkat pendapatan petani. Namun demikian, pembangunan sektor pertanian dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan menghadapi beberapa tantangan yang membutuhkan solusi untuk mengatasinya. Tantangan tersebut diantaranya alih fungsi lahan, ketersediaan air, produktivitas, organisme pengganggu tanaman dan ternak, dampak perubahan iklim dan SDM Petani. Selain itu ketersediaan produksi antar waktu dan antar wilayah juga menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan pertanian ke depan. Secara keseluruhan, pembangunan pertanian di Jawa Tengah perlu pendekatan holistik yang mencakup penguatan produksi, distribusi yang efisien, pemberdayaan petani dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2. Kesejahteraan Pelaku Usaha Pertanian

   Petani di Jawa Tengah, yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian terutama padi, jagung, kedelai, hortikultura dan peternakan, seringkali menghadapi ketidakpastian ekonomi. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi petani diantaranya harga komoditas yang fluktuatif, biaya produksi yang tinggi (bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja), keterbatasan akses pasar, permodalan dan harga yang cenderung fluktuatif. Kesejahteraan petani menjadi hal krusial yang patut menjadi perhatian. Diperlukan strategi agar pendapatan petani lebih baik dengan tetap memperhatikan kemampuan/daya beli konsumen. Perlu dukungan terhadap transformasi sektor pertanian yang lebih berkelanjutan dan berbasis teknologi, membawa petani untuk tidak hanya sebagai pembudidaya tetapi juga mendorong petani untuk bergerak dalam ekonomi dengan penguatan kelembagaan ekonomi petani, akses pasar, teknologi, jaminan harga, pengolahan pada saat panen raya serta perlindungan/jaminan gagal panen dan modal.

3. Tata Kelola pelayanan perangkat daerah yang adaptif, dinamis dan kolaboratif

   Tata Kelola pelayanan perangkat daerah merupakan isu penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang dinamis dan efektif didukung dengan integritas. Selain itu, penerapan prinsip *collaborative governance* menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan program pembangunan sekaligus upaya pemecahan permasalahan dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah yang "Nglakoni Ngopeni". Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM aparatur serta *reward and punishment* yang jelas.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Tujuan pembangunan jangka menengah yang terjabarkan dalam Renstra diarahkan untuk pelaksanaan visi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu "**JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045"** yang akan dicapai melalui 6 (enam) misi yaitu :

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Implementasi dari visi misi tersebut dilaksanakan dengan filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk "NGOPENI. NGLAKONI Jateng". "Ngopeni" bermakna melayani masyarakat dan memelihara capaian pembangunan yang telah diwujudkan oleh para pemimpin terdahulu. "Nglakoni" bermakna melaksanakan komiten dengan penuh tanggung jawab, menyelesaikan masalah, dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Perwujudan Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan untuk mendukung Indonesia Emas 2045, didukung dengan tiga pilar pembangunan daerah yaitu:

1. transformasi ekonomi (JATENG MAKMUR), dengan terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan;
2. transformasi sosial (JATENG NYAMAN) , dengan terwujudnya sumber daya manusia Jawa Tengah berdaya saing dan berkarakter;
3. transformasi tata kelola (JATENG SIGAP), dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis.

Dalam rangka menjabarkan pelaksanaan visi, misi, dan fokus kerja pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025-2029, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya tujuan dan sasaran akan menjadi pedoman dalam perumusan strategi, arah kebijakan dan rencana program kegiatan sebagai

implementasinya. Tujuan pembangunan pertanian dan peternakan selama periode tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian.
   Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian menjadi bagian dari upaya perwujudan makna “Maju” dari Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu sebagai episentrum lumbung pangan. Selain itu juga menjadi perwujudan dari pelaksanaan misi ke 2 “Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan” dan pilar tarnsformasi ekonomi (JATENG MAKMUR). Pencapaianya dilakukan melalui upaya peningkatan produksi pertanian dan peternakan.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis.
   Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis dalam Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan dari Misi pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas” dan pilar transformasi tata kelola dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis (JATENG SIGAP). Pelaksanaanya dilakukan dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat dengan semangat *collaborative governance*.

Dalam rangka pelaksanaan tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan Peternakan, ditetapkan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi pertanian, merupakan pelaksanaan dari tujuan Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian. Pencapaianya diterjemahkan dalam 4 (empat) indikator yaitu produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura, produksi tanaman perkebunan serta peningkatan kelembagaan petani dan peternak yang meningkat kapasitas usahanya.
2. Meningkatnya produksi peternakan, merupakan pelaksanaan dari tujuan Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian. Pencapaianya diterjemahkan dalam 1 (satu) indikator yaitu produksi ternak.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, merupakan pelaksanaan dari tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis. Pencapaianya diterjemahkan dalam 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas pengelolaa risiko perangkat daerah, merupakan pelaksanaan dari tujuan Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis. Pencapaianya diterjemahkan dalam 1 (satu) indikator yaitu Indeks Manajeman Risiko Perangkat Daerah.

Selengkapnya Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2025-2029
Tujuan 1 PDRB Sektor Pertanian

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2023	Baseline Tahun 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian		Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor pertanian	%	1,12	1,17	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,09
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Tanaman Pangan	Ton	14.921.830	12.248.637	12.628.175	12.734.625	12.842.028	12.950.425	13.059.794	13.170.147	64.757.019
		Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	965.219	1.057.770	1.063.058	1.073.636	1.089.741	1.106.087	1.122.678	1.139.518	5.531.660
		Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	2.738.950	3.860.443	3.864.222	3.868.066	3.871.909	3.875.790	3.879.661	3.883.535	19.378.961
		Persentase kenaikan jumlah kelembagaan petani dan peternak yang meningkat kapasitas usahanya	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Ternak	Ton	1.857.035	1.908.389	1.922.605	1.936.930	1.951.366	1.965.913	1.980.571	1.995.343	1.995.343

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2025-2029
Tujuan 2 Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2023	Baseline Tahun 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	N/A	N/A	74	74,5	75	75,5	76	77	77
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	N/A	N/A	81	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	N/A	N/A	2,85	2,9	2,95	3	3,05	3,15	3,15

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor pertanian dan peternakan di Jawa Tengah. Strategi dan arah kebijakan yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan sektor pertanian dan peternakan difokuskan pada peningkatan produksi dan penguatan kelembagaan petani peternak. Selengkapnya dapat diajarkan sebagai berikut :

Tujuan 1. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Pertanian

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya produksi pertanian dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Indeks Pertanaman, fokus pada upaya penyediaan air pertanian melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier; irigasi alternatif dengan sumur dangkal, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan dan irigasi sprinkle; pemanfaatan alsintan perpompaan untuk kebutuhan air; perlindungan lahan pertanian dan pemanfaatan lahan-lahan yang berpotensi untuk pertanian dengan *integrated farming*; pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian untuk percepatan tanam; serta pertanaman antar waktu antar wilayah untuk ketersediaan pasokan
2. Peningkatan Produktivitas tanaman, fokus pada penerapan *good agriculture practice* dan *good handling practice* untuk peningkatan kualitas dan kapasitas panen; pengamanan produksi dengan gerakan penanganan serangan organisme pengganggu tanaman, penanganan dampak perubahan iklim; penggunaan bibit/benih unggul dan bersertifikat; optimalisasi kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu bersertifikat; sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih; serta perbaikan kualitas lahan dengan pemupukan berimbang dan penggunaan pupuk organik/pembenah tanah.
3. Penguatan Kelembagaan Petani, fokus pada peningkatan akses petani terhadap pembiayaan/modal dengan fasilitasi subsidi suku bunga; pelatihan untuk peningkatan kompetensi petani dan fasilitasi akses petani terhadap inovasi teknologi pertanian; pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi petani; perlindungan petani dengan asuransi gagal panen, akses pupuk, upaya penghapusan hutang petani, jaminan pasar dan harga; serta pelatihan dan pendampingan petani milenial termasuk pesantren untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi petani dan mendorong petani milenial sebagai agen perubahan pertanian di daerah.

Sasaran 2. Meningkatnya produksi peternakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya produksi pertanian dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas ternak dengan penyediaan prasarana, benih dan bibit berkualitas, yang dilakukan melalui pengembangan dan perbaikan mutu genetik, pengembangan kawasan wilayah sumber bibit, Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB), Revitalisasi UPT Perbibitan (Balai Inseminasi Buatan dan Balai Pembibitan Ternak), Penerapan teknologi perbibitan melalui Inseminasi Buatan, Embrio Transfer, uji zuriat dan uji performans, Penerapan GBP (*Good Breeding Practice*), Penerapan GFP (*Good Farming Practice*), Pengawasan produksdi dan peredaran benih dan bibit ternak, Pengawasan dan pembinaan peredaran pakan.

2. Pengendalian penyakit hewan menular strategis, kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner melalui pengawasan lalu lintas ternak, Pengawasan peredaran obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan, Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan, Pengawasan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan, serta penjaminan hiegine dan sanitasi.
3. Peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM Peternak, melalaui pealatihan peternak/pelaku usaha bidang peternakan, fasilitasi kelembagaan peternak, pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan.

Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dilakukan melalui arah kebijakan peningkatan kualitas SDM dan perbaikan manajemen pemerintahan dengan strategi sebagai berikut :

1. Pemetaan kebutuhan SDM dan penempatan sesuai dengan kompetensi;
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM sebagai pelayanan masyarakat;
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;
4. Perbaikan tata kelola manajeman pemerintahan yang dinamis, adaptif, akuntabel, kolaboratif, efektif dan efisien dilandasi semangat Ngopeni, Nglakoni.

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut : peningkatan Implementasi manajemen risiko menuju tata kelola yang akuntabel dan transparan melalui mengoptimalkan peran Satuan Pengawas Internal (SPI); mengembangkan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan risiko secara berkala; dan meningkatkan koordinasi antar unit kerja, instansi, serta pemangku kepentingan dalam mitigasi risiko.

Selengkapnya perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1.1. Meningkatnya Produksi Pertanian	1.1.1. Peningkatan Indeks Pertanaman	1.1.1.1 penyediaan air pertanian melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier, irigasi alternatif dengan sumur dangkal, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan dan irigasi sprinkle 1.1.1.2 pemanfaatan alsintan perpompaan untuk kebutuhan air 1.1.1.3 perlindungan lahan pertanian dan pemanfaatan lahan-lahan yang berpotensi untuk pertanian dengan *integrated farming* 1.1.1.4 pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian untuk percepatan tanam 1.1.1.5 pertanaman antar waktu antar wilayah untuk ketersediaan pasokan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		1.1.2. Peningkatan Produktivitas tanaman	1.1.2.1. penerapan g*ood agriculture practice* dan *good handling practice* untuk peningkatan kualitas dan kapasitas panen 1.1.2.2. pengamanan produksi dengan gerakan penanganan serangan organisme pengganggu tanaman dan penaganan dampak perubahan iklim 1.1.2.3. penggunaan bibit/benih unggul dan bersertifikat 1.1.2.4. optimalisasi kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu bersertifikat 1.1.2.5. sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih 1.1.2.6. perbaikan kualitas lahan dengan pemupukan berimbang dan penggunaan pupuk organik/ pembenah tanah.
		1.1.3. Penguatan Kelembagaan Petani	1.1.3.1. peningkatan akses petani terhadap pembiayaan/modal dengan fasilitasi subsidi suku bunga 1.1.3.2. pelatihan untuk peningkatan kompetensi petani dan fasilitasi akses petani terhadap inovasi teknologi pertanian

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			1.1.3.3. pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi petani 1.1.3.4. perlindungan petani dengan asuransi gagal panen, akses pupuk, upaya penghapusan hutang petani, jaminan pasar dan harga 1.1.3.5. pelatihan dan pendampingan petani milenial termasuk pesantren untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi petani dan mendorong petani milenial sebagai agen perubahan pertanian di daerah
	1.2. Meningkatnya produksi peternakan	1.2.1. Peningkatan produktivitas ternak dengan penyediaan prasarana, benih dan bibit berkualitas	1.2.1.1. pengembangan dan perbaikan mutu genetik 1.2.1.2. pengembangan kawasan wilayah sumber bibit 1.2.1.3. Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) 1.2.1.4. Revitalisasi UPT Perbibitan (Balai Inseminasi Buatan dan Balai Pembibitan Ternak) 1.2.1.5. Penerapan teknologi perbibitan melalui Inseminasi Buatan, Embrio Transfer, uji zuriat dan uji performans

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			1.2.1.6. Penerapan GBP (*Good Breeding Practice*), Penerapan GFP (*Good Farming Practice)* 1.2.1.7. Pengawasan produksi dan peredaran benih dan bibit ternak 1.2.1.8. penyediaan pakan ternak berkualitas 1.2.1.9. Pengawasan dan pembinaan peredaran pakan
		1.2.2. Pengendalian penyakit hewan menular strategis, kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	1.2.2.1. pengawasan lalu lintas ternak 1.2.2.2. Pengawasan peredaran obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan 1.2.2.3. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan 1.2.2.4. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan 1.2.2.5. penjaminan hiegine dan sanitasi
		1.2.3 Peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM Peternak	1.2.3.1 pelatihan peternak/pelaku usaha bidang peternakani 1.2.3.2 fasilitasi kelembagaan peternak 1.2.3.3 pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 2. Peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pertanian dan Peternakan	2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	2.1.1. peningkatan kualitas SDM dan perbaikan manajemen pemerintahan	2.1.1.1. Pemetaan kebutuhan SDM dan penempatan sesuai dengan kompetensi 2.1.1.2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM sebagai pelayanan masyarakat 2.1.1.3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi 2.1.1.4. Perbaikan tata kelola manajeman pemerintahan yang dinamis, adaptif, akuntabel, kolaboratif, efektif dan efisien dilandasi semangat Ngopeni, Nglakoni
	2.2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	2.2.1. peningkatan Implementasi manajemen risiko menuju tata kelola yang akuntabel dan transparan	2.2.1.1. mengoptimalkan peran Satuan Pengawas Internal (SPI) 2.2.1.2. mengembangkan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan risiko secara berkala 2.2.1.3. meningkatkan koordinasi antar unit kerja, instansi, serta pemangku kepentingan dalam mitigasi risiko

Untuk Pentahapan pembanguan yang menggambarkan prioritas pembangunan tahunan terjabarkan sebagai berikut.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026

Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Tema pembangunan pertanian dan peternakan Tahun 2026 diarahkan pada "Penguatan Database dan Infrastruktur Pertanian dan Peternakan" dengan prioritas pada :

1. Penguatan infrastruktur irigasi pertanian melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier terutama dengan kondisi rusak dan/atau non permanen/tanah;
2. Penguatan infrastruktur irigasi pertanian alternatif dengan sumur, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, irigasi sprinkle dan irigasi pertanian alternatif lainnya;
3. Perlindungan dan perbaikan kualitas lahan pertanian;
4. Penguatan penggunaan alat mesin pertanian dan peternakan;
5. Penguatan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan ternak;
6. Penggunaan benih/bibit unggul berkualitas dan bersertifikat serta sarana produksi pertanian peternakan lainnya;
7. Optimalisasi kebun benih sebagai penghasil benih unggulan bersertifikat dan Revitalisasi UPT Perbibitan (Balai Inseminasi Buatan dan Balai Pembibitan Ternak) serta pengawasan peredaran benih;
8. Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan petani serta akses pembiayaan, pasar, harga dan perlindungan dari gagal panen bagi petani dan peternak bagi petani dan peternak;
9. Koordinasi dan kolaborasi bersama unsur dan *stakeholder* terkait dalam upaya penguatan infrastruktur pertanian peternakan untuk peningkatan produksi pertanian dan peternakan.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2027

Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Tema pembangunan pertanian dan peternakan Tahun 2027 diarahkan pada "Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan" dengan prioritas pada :

1. Peningkatan penerapan *good agriculture practice* dan *good handling practice* untuk peningkatan kualitas dan kapasitas panen;
2. Peningkatan perbaikan kualitas lahan dengan pemupukan berimbang;
3. Peningkatan penggunaan benih/bibit unggul dan bersertifikat;
4. Pengamanan produksi dengan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman/ternak dan penanganan dampak perubahan iklim;
5. Peningkatan ketersediaan sumberdaya air pertanian dengan perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan ketersediaan irigasi alternatif;
6. Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana serta teknologi pertanian dan peternakan;
7. Pengembangan kawasan wilayah sumber bibit

8. Peningkatan pemanfaatan kebun benih sebagai penghasil benih unggu bersertifikat dan Revitalisasi UPT Perbibitan (Balai Inseminasi Buatan dan Balai Pembibitan Ternak) serta serta pengawasan peredaran benih.
9. Penguatan kelembagaan, kapasitas SDM serta akses pembiayaan, pasar, harga dan perlindungan dari gagal panen bagi petani dan peternak.
10. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi bersama unsur dan *stakeholder* terkait dalam upaya penguatan infrastruktur pertanian peternakan untuk peningkatan produksi pertanian dan peternakan.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2028

Tahun 2028 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Tema pembangunan pertanian dan peternakan Tahun 2028 diarahkan pada "Pengembangan pertanian berkelanjutan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi" dengan prioritas pada :

1. Penguatan penerapan *good agriculture practice* dan *good handling* practice dalam berbudidaya;
2. Pemupukan berimbang untuk perbaikan kualitas lahan pertanian dan peningkatan penggunaan pupuk organik;
3. Keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air pertanian melalui perbaikan DAS atau sisi hulu kolaborasi dengan OPD teknis dan *stakeholders* terkait;
4. Penguatan irigasi alternatif dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan air dalam tanah/Cadangan Air Tanah;
5. Penguatan penggunaan benih/bibit varietas unggul baru dan bersertifikat;
6. Peningkatan penggunaan bahan pengendalai organisme penggangu tanaman/ternak dengan bahan organik;
7. Penguatan pemanfaatan sarana prasarana serta teknologi pertanian dan peternakan dalam budidaya;
8. Penguatan Pengembangan kawasan wilayah sumber bibit
9. Peningkatan pemanfaatan kebun benih sebagai penghasil benih unggu bersertifikat dan Revitalisasi UPT Perbibitan (Balai Inseminasi Buatan dan Balai Pembibitan Ternak) serta pengawasan peredaran benih.
10. Penguatan dan pengembangan kelembagaan, kapasitas SDM serta akses pembiayaan, pasar, harga dan perlindungan dari gagal panen bagi petani dan peternak bagi petani dan peternak.
11. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pertanian berkelajutan.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2029

Tahun 2029 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Tema pembangunan pertanian dan peternakan Tahun 2029 diarahkan pada "Peningkatan kelembagaan ekonomi dan daya saing pertanian" dengan prioritas pada :

1. Penguatan kelembagaan ekonomi petani dan peternak;
2. Penguatan kapasitas SDM petani dan peternak untuk peningkatan daya saing;

3. Penguatan akses pembiayaan, jaminan pasar dan harga serta perlindungan dari gagal panen bagi petani dan peternak bagi petani dan peternak.
4. Penguatan penerapan *good agriculture practice* dan *good handling* practice dalam berbudidaya;
5. Penguatan ketersediaan dan akses petani terhadap sarana prasarana budidaya pertanian dan peternakan;
6. Penguatan Pengembangan kawasan wilayah sumber bibit;
7. Peningkatan pemanfaatan kebun benih sebagai penghasil benih unggul bersertifikat dan Revitalisasi UPT Perbibitan (Balai Inseminasi Buatan dan Balai Pembibitan Ternak) serta pengawasan peredaran benih;
8. Penguatan dan pengembangan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung peningkatan kelembagaan ekonomi petani/peternak serta daya saing produksi pertanian dan peternakan.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2030

Tahun 2030 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Tema pembangunan pertanian dan peternakan Tahun 2030 diarahkan pada "Perwujudan swasembada pangan menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan" dengan prioritas pada :

1. Peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan dengan penggunaan benih/bibit unggul, pengamanan dari serangan organisme pengganggu tanaman/ternak, dan penggunaan pupuk berimbang;
2. Peningkatan indeks pertanaman komoditas pertanian dengan pemanfaatan lahan secara optmimal didukung perlindungan lahan dan perbaikan kualitas lahan pertanian;
3. Perwujudan tata kelola budidaya pertanian dan peternakan yang baik dengan pemanfaatan inovasi teknologi dan sarana prasarana seperti alat mesin pertanian;
4. Perwujudan kapasitas SDM dan kesejahteraan petani dan peternak dengan pelatihan, fasilitasi pembiayaan, perlindungan gagal panen, jaminan pasar dan harga;
5. Penguatan Pengembangan kawasan wilayah sumber bibit/benih;
6. Pemanfaatan kebun benih sebagai penghasil benih unggul bersertifikat dan Revitalisasi UPT Perbibitan (Balai Inseminasi Buatan dan Balai Pembibitan Ternak) serta pengawasan peredaran benih;
7. Perwujudan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung peningkatan kelembagaan ekonomi petani/peternak serta daya saing produksi pertanian dan peternakan.

Tabel 3.4.
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Penguatan database dan infrastruktur pertanian dan peternakan, dengan priroitas pada: 1. Penguatan infrastruktur irigasi pertanian melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier terutama dengan kondisi rusak dan/atau non permanen/tanah; 2. Penguatan infrastruktur irigasi pertanian alternatif dengan sumur, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, irigasi sprinkle dan irigasi pertanian alternatif lainnya; 3. Perlindungan dan perbaikan kualitas lahan pertanian;	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan, dengan prioritas pada: 1. Peningkatan penerapan *good agriculture practice* dan *good handling practice* untuk peningkatan kualitas dan kapasitas panen; 2. Peningkatan perbaikan kualitas lahan dengan pemupukan berimbang; 3. Peningkatan penggunaan benih/bibit unggul dan bersertifikat; 4. Pengamanan produksi dengan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman/ternak dan	Pengembangan pertanian berkelanjutan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dengan prioritas pada: 1. Penguatan penerapan *good agriculture practice* dan *good handling* practice dalam berbudidaya; 2. Pemupukan berimbang untuk perbaikan kualitas lahan pertanian dan peningkatan penggunaan pupuk organik; 3. Keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air pertanian melalui perbaikan DAS atau sisi hulu kolaborasi dengan OPD teknis dan stakeholders terkait; 4. Penguatan irigasi alternatif dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan air	Peningkatan kelembagaan ekonomi dan daya saing pertanian, dengan prioritas pada: 1. Penguatan kelembagaan ekonomi petani dan peternak; 2. Penguatan kapasitas SDM petani dan peternak untuk peningkatan daya saing; 3. Penguatan akses pembiayaan, jaminan pasar dan harga serta perlindungan dari gagal panen bagi petani dan peternak bagi petani dan peternak. 4. Penguatan penerapan *good agriculture practice* dan g*ood handling practice* dalam berbudidaya;	Perwujudan swasembada pangan menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan, dengan prioritas pada: 1. Peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan dengan penggunaan benih/bibit unggul, pengamanan dari serangan organisme pengganggu tanaman/ternak, dan penggunaan pupuk berimbang; 2. Peningkatan indeks pertanaman komoditas pertanian dengan pemanfaatan lahan secara optmimal didukung perlindungan lahan dan perbaikan kualitas lahan pertanian;

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
4. Penguatan penggunaan alat mesin pertanian dan peternakan; 5. Penguatan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan ternak; 6. Penggunaan benih/bibit unggul berkualitas dan bersertifikat serta sarana produksi pertanian peternakan lainnya; 7. Optimalisasi kebun benih sebagai penghasil benih unggulan bersertifikat dan Revitalisasi UPT Perbibitan (Balai Inseminasi Buatan dan Balai Pembibitan Ternak) serta pengawasan peredaran benih; 8. Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan petani serta akses	penanganan dampak perubahan iklim; 5. Peningkatan ketersediaan sumberdaya air pertanian dengan perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan ketersediaan irigasi alternatif; 6. Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana serta teknologi pertanian dan peternakan; 7. Pengembangan kawasan wilayah sumber bibit 8. Peningkatan pemanfaatan kebun benih sebagai penghasil benih unggu bersertifikat dan Revitalisasi UPT Perbibitan (Balai Inseminasi Buatan dan Balai Pembibitan	dalam tanah/Cadangan Air Tanah; 5. Penguatan penggunaan benih/bibit varietas unggul baru dan bersertifikat; 6. Peningkatan penggunaan bahan pengendalai organisme penggangu tanaman/ternak dengan bahan organik; 7. Penguatan pemanfaatan sarana prasarana serta teknologi pertanian dan peternakan dalam budidaya; 8. Penguatan Pengembangan kawasan wilayah sumber bibit 9. Peningkatan pemanfaatan kebun benih sebagai penghasil benih unggu bersertifikat dan Revitalisasi UPT Perbibitan (Balai Inseminasi Buatan dan Balai Pembibitan Ternak)	5. Penguatan ketersediaan dan akses petani terhadap sarana prasarana budidaya pertanian dan peternakan; 6. Penguatan Pengembangan kawasan wilayah sumber bibit; 7. Peningkatan pemanfaatan kebun benih sebagai penghasil benih unggul bersertifikat dan Revitalisasi UPT Perbibitan (Balai Inseminasi Buatan dan Balai Pembibitan Ternak) serta pengawasan peredaran benih; 8. Penguatan dan pengembangan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung peningkatan	3. Perwujudan tata kelola budidaya pertanian dan peternakan yang baik dengan pemanfaatan inovasi teknologi dan sarana prasarana seperti alat mesin pertanian; 4. Perwujudan kapasitas SDM dan kesejahteraan petani dan peternak dengan pelatihan, fasilitasi pembiayaan, perlindungan gagal panen, jaminan pasar dan harga; 5. Penguatan Pengembangan kawasan wilayah sumber bibit/benih; 6. Pemanfaatan kebun benih sebagai penghasil benih unggul bersertifikat dan Revitalisasi UPT Perbibitan (Balai Inseminasi Buatan dan

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
pembiayaan, pasar, harga dan perlindungan dari gagal panen bagi petani dan peternak bagi petani dan peternak; 9. Koordinasi dan kolaborasi bersama unsur dan stakeholder terkait dalam upaya penguatan infrastruktur pertanian peternakan untuk peningkatan produksi pertanian dan peternakan.	Ternak) serta serta pengawasan peredaran benih. 9. Penguatan kelembagaan, kapasitas SDM serta akses pembiayaan, pasar, harga dan perlindungan dari gagal panen bagi petani dan peternak. 10. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi bersama unsur dan *stakeholder* terkait dalam upaya penguatan infrastruktur pertanian peternakan untuk peningkatan produksi pertanian dan peternakan.	serta pengawasan peredaran benih. 10. Penguatan dan pengembangan kelembagaan, kapasitas SDM serta akses pembiayaan, pasar, harga dan perlindungan dari gagal panen bagi petani dan peternak bagi petani dan peternak. 12. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pertanian berkelajutan.	kelembagaan ekonomi petani/peternak serta daya saing produksi pertanian dan peternakan.	Balai Pembibitan Ternak) serta pengawasan peredaran benih; 7. Perwujudan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung peningkatan kelembagaan ekonomi petani/peternak serta daya saing produksi pertanian dan peternakan.

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risisko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Manajemen risiko pembangunan pertanian selama 5 (lima) tahun mendatang sebagaiamanan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.5.
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyata-an Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penang-gung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan Strategis:								
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor pertanian							
Sasaran Strategis:								
Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Tanaman Pangan	Produksi komoditas tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) tidak mencapai target	16	Terjadinya gagal panen	Pendapatan petani menurun	Sosialisasi *Good Agriculture Practice* (GAP) serta pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim	Kepala Dinas	Tahun 2025 - 2029
Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Tanaman Hortikultura	Produksi bawang merah tidak mencapai target	6	Terjadinya gagal panen	Pendapatan petani menurun	Pertemuan, koordinasi dan sosialisasi	Kepala Dinas	Tahun 2025 - 2029
Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi tebu tidak mencapai target	6	Terjadinya gagal panen	Produksi tebu tidak mencapai target	Pertemuan, koordinasi dan sosialisasi	Kepala Dinas	Tahun 2025 - 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyata-an Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penang-gung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase kenaikan jumlah kelembagaan petani dan peternak yang meningkat kapasitas usahanya	Kelembagaan petani belum berkembang optimal	6	Kurangnya minat dan partisipasi kelembagaan	Kapasitas Usaha Petani dan Peternak belum optimal	Pelatihan dan Pendampingan kelembagaan	Kepala Dinas	Tahun 2025 - 2029
Meningkatnya Produksi Ternak	Produksi Ternak	Serangan penyakit hewan menular strategis	16	Tingginya mobilitas ternak antar daerah	Kerugian ekonomi peternak	Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak dan vaksinasi	Kepala Dinas	Tahun 2025-2029
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Nilai Sakip menurun	10	Layanan Publik belum optimal	Menurunnya kepercayaan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kepala Dinas	Tahun 2025 - 2029
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Manajemen Risiko Belum Optimal	10	Indeks Manajemen Risiko Menurun	Pemahaman Manajemen resiko terbatas	Monitoring Evaluasi Risiko	Kepala Dinas	Tahun 2025 - 2029

BAB IV.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah

Program pembangunan pertanian dan peternakan merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian dan peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan akhirnya mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Dalam mewujudkan pembangunan pertanian dan peternakan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 6 program pembangunan yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana; Program Penyuluhan Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Program Penunjang Urusan Pemerintah.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh 11 unit kerja terdiri atas 4 bidang dan 7 unit pelaksana teknis.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Bidang Budidaya diarahkan untuk peningkatan populasi ternak yang terdiri atas 23 komoditas ternak yang dikembangkan dan peningkatan produksi hasil ternak meliputi daging, susu, telur melalui penyediaan benih dan bibit ternak berkualitas, pengembangan pakan ternak berkualitas serta pengembangan kawasan peternakan yang berbasis sumber daya lokal.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Bidang Veteriner diarahkan untuk pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan agar dapat memenuhi persyaratan keamanan (safety), dan standar mutu (quality).

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan diarahkan untuk peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui fasilitasi untuk petani dengan penyediaan benih unggul dan bersertifikat.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Balai Benih di 3 (tiga) wilayah (Semarang, Surakarta dan Banyumas) diarahkan untuk penyediaan benih berkualitas dan bersertifikat serta pemeliharaan pohon induk dan pohon produksi. Adapun pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih diarahkan untuk pelayanan sertifikasi benih serta pengawasan peredaran benih komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A diarahkan untuk pengawasan ketersediaan dan sebaran alsintan serta pengelola alsintan; rekayasa dan

pengembangan alsintan.

Program pada Balai Inseminasi Buatan diarahkan untuk penyediaan benih (semen beku) sapi potong, sapi perah dan kambing yang berkualitas, sebagai upaya peningkatan mutu genetik ternak, melalui pemeliharaan pejantan unggul, optimalisasi produksi, distribusi, dan pemasaran. Program pada Balai Pembibitan Ternak diarahkan sebagai balai pembibitan yang menghasilkan ternak konsumsi dan ternak bibit berkualitas.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian diarahkan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian dan peternakan agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian dan peternakan yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang diarahkan untuk peningkatan produksi pertanian dan peternakan melalui fasilitasi rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan alternatif, pupuk non subsidi, alat mesin pertanian peternakan dan prasarana pertanian peternakan lainnya.

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan oleh Balai Pelindungan Tanaman diarahkan untuk pengendalian dan penanganan serangan organisme pengganggu tanaman, serta mitigasi dan penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanaman dalam rangka peningkatan produksi tanaman.

Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh Bidang Kelembagaan dan Balai Pelatihan Pertanian yang diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM petani dan peternak, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan peternak, fasilitasi pembiayaan dan asuransi gagal panen, pendampingan dalam pengembangan usaha termasuk pemberian stimulan bantuan prasarana sarana serta pengembangan jejaring usaha dan kemitraan.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diarahkan untuk memfasilitasi peningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengamatan dan identifikasi, pencegahan, pengamanan, serta pengobatan hewan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat diarahkan pada program pengawasan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), serta penerapan kesejehteraan hewan. Program ini dilaksanakan oleh 2 unit kerja terdiri atas 1 bidang dan 1 unit pelaksana teknis.

Program Penunjang Urusan Pemerintah

Program ini untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dinas, memfasilitasi penambahan dan pemeliharaan dan perawatan asset – asset dinas baik yang bergerak maupun tidak bergerak, memfasilitasi pengadaan kelengkapan aparatur dalam rangka peningkatran

disiplin kerja aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, perencanaan data dan evaluasi pembangunan peternakan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, diarahkan untuk penyediaan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah diantaranya gaji dan tunjangan pegawai.
2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, diarahkan untuk penyediaan kebutuhan administrasi barang milik daerah.
3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, diarahkan untuk penyediaan kebutuhan administrasi pendapatan daerah.
4. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah, diarahkan untuk penyediaan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, diarahkan untuk penyediaan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah, diarahkan untuk penyediaan kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diarahkan untuk penyediaan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah, diarahkan untuk penyediaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
9. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, diarahkan untuk penyusunan program kerja dan dokumen perencanaan.
10. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja, diarahkan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja .

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pertanian dan Peternakan *								166,892,964,000		185,604,099,000		188,353,726,000		204,168,114,000		218,849,080,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan *	Angka	72	74.5		75		75.5		76		77		Dinas Pertanian dan Peternakan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan **						165,504,251,000		184,111,241,000		186,839,867,000		200,533,256,000		213,587,222,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan **	Angka	81.75	81.5	165,504,251,000	82	184,111,241,000	82.5	186,839,867,000	83	200,533,256,000	83.5	213,587,222,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						149,200,312,000		162,058,862,000		164,261,758,000		173,763,109,000		182,409,246,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan ***	%	100	100	149,200,312,000	100	162,058,862,000	100	164,261,758,000	100	173,763,109,000	100	182,409,246,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						117,063,858,000		120,089,725,000		121,997,413,000		125,355,217,000		130,001,048,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Meingkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	117,063,858,000	100	120,089,725,000	100	121,997,413,000	100	125,355,217,000	100	130,001,048,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****						114,400,457,000		117,425,824,000		119,332,012,000		121,689,816,000		125,335,647,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	618	778	114,400,457,000	778	117,425,824,000	778	119,332,012,000	778	121,689,816,000	778	125,335,647,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Pertanian dan Peternakan

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						2,597,901,000		2,598,401,000		2,599,901,000		3,599,901,000		4,599,901,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	2,597,901,000	12	2,598,401,000	12	2,599,901,000	12	3,599,901,000	12	4,599,901,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****						15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****						50,500,000		50,500,000		50,500,000		50,500,000		50,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	N/A	4	50,500,000	4	50,500,000	4	50,500,000	4	50,500,000	4	50,500,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						568,399,000		569,399,000		570,399,000		571,399,000		572,399,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Meingkatnya Kualitas Layanan Administrasi Barang Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah ****	%	100	100	568,399,000	100	569,399,000	100	570,399,000	100	571,399,000	100	572,399,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						405,500,000		406,000,000		406,500,000		407,000,000		407,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	12	4	405,500,000	4	406,000,000	4	406,500,000	4	407,000,000	4	407,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						142,304,000		142,804,000		143,304,000		143,804,000		144,304,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	12	4	142,304,000	4	142,804,000	4	143,304,000	4	143,804,000	4	144,304,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****						20,595,000		20,595,000		20,595,000		20,595,000		20,595,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	20,595,000	1	20,595,000	1	20,595,000	1	20,595,000	1	20,595,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ****						111,000,000		111,000,000		111,000,000		111,000,000		111,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			tersedianya laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ****	Laporan	1	1	111,000,000	1	111,000,000	1	111,000,000	1	111,000,000	1	111,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****						111,000,000		111,000,000		111,000,000		111,000,000		111,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	N/A	1	111,000,000	1	111,000,000	1	111,000,000	1	111,000,000	1	111,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****						278,641,000		299,141,000		299,641,000		300,141,000		400,641,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Meingkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah ****	%	100	100	278,641,000	100	299,141,000	100	299,641,000	100	300,141,000	100	400,641,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****						3,920,000		3,920,000		3,920,000		3,920,000		3,920,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	1	3,920,000	1	3,920,000	1	3,920,000	1	3,920,000	1	3,920,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****						3,920,000		3,920,000		3,920,000		3,920,000		3,920,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	N/A	1	3,920,000	1	3,920,000	1	3,920,000	1	3,920,000	1	3,920,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****						258,301,000		278,801,000		279,301,000		279,801,000		380,301,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	N/A	60	258,301,000	60	278,801,000	60	279,301,000	60	279,801,000	60	380,301,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****						12,500,000		12,500,000		12,500,000		12,500,000		12,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	40	12,500,000	40	12,500,000	40	12,500,000	40	12,500,000	40	12,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						2,034,627,000		2,933,466,000		3,293,961,000		4,685,479,000		5,601,252,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	2,034,627,000	100	2,933,466,000	100	3,293,961,000	100	4,685,479,000	100	5,601,252,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						59,723,000		60,223,000		60,723,000		156,092,000		661,723,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	4	59,723,000	4	60,223,000	4	60,723,000	4	156,092,000	4	661,723,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						208,609,500		209,609,500		210,609,500		211,609,500		312,609,500	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	4	208,609,500	4	209,609,500	4	210,609,500	4	211,609,500	4	312,609,500	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						141,578,000		142,578,000		143,578,000		144,578,000		245,578,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	4	141,578,000	4	142,578,000	4	143,578,000	4	144,578,000	4	245,578,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						251,840,000		251,840,000		251,840,000		251,840,000		351,840,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	251,840,000	1	251,840,000	1	251,840,000	1	251,840,000	1	351,840,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						149,145,000		275,145,000		276,145,000		277,145,000		278,145,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	4	149,145,000	4	275,145,000	4	276,145,000	4	277,145,000	4	278,145,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						217,019,000		248,019,000		249,019,000		350,019,000		351,019,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	4	217,019,000	4	248,019,000	4	249,019,000	4	350,019,000	4	351,019,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						966,325,000		1,705,164,000		2,060,659,000		3,252,308,000		3,357,950,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	4	966,325,000	4	1,705,164,000	4	2,060,659,000	4	3,252,308,000	4	3,357,950,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						40,387,500		40,887,500		41,387,500		41,887,500		42,387,500	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	4	40,387,500	4	40,887,500	4	41,387,500	4	41,887,500	4	42,387,500	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						1,017,700,000		1,320,200,000		1,327,700,000		1,335,200,000		1,692,733,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1,017,700,000	1	1,320,200,000	1	1,327,700,000	1	1,335,200,000	1	1,692,733,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengadaan Mebel *****						60,000,000		60,500,000		61,000,000		61,500,000		62,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	60,000,000	1	60,500,000	1	61,000,000	1	61,500,000	1	62,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						617,100,000		717,600,000		718,100,000		718,600,000		819,100,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	617,100,000	1	717,600,000	1	718,100,000	1	718,600,000	1	819,100,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****						172,500,000		372,500,000		377,500,000		382,500,000		387,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	172,500,000	1	372,500,000	1	377,500,000	1	382,500,000	1	387,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengadaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						85,000,000		86,000,000		87,000,000		88,000,000		139,033,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	85,000,000	1	86,000,000	1	87,000,000	1	88,000,000	1	139,033,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						83,100,000		83,600,000		84,100,000		84,600,000		285,100,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	83,100,000	1	83,600,000	1	84,100,000	1	84,600,000	1	285,100,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						25,146,280,000		26,312,950,000		27,415,663,000		28,335,692,000		28,628,192,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	25,146,280,000	12	26,312,950,000	12	27,415,663,000	12	28,335,692,000	12	28,628,192,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						9,006,000		9,506,000		10,006,000		10,506,000		11,006,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	4	9,006,000	4	9,506,000	4	10,006,000	4	10,506,000	4	11,006,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						2,113,281,000		2,314,281,000		2,415,281,000		2,416,281,000		2,517,281,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	2,113,281,000	12	2,314,281,000	12	2,415,281,000	12	2,416,281,000	12	2,517,281,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						183,892,000		184,892,000		185,892,000		186,892,000		277,892,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	4	183,892,000	4	184,892,000	4	185,892,000	4	186,892,000	4	277,892,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						22,840,101,000		23,804,271,000		24,804,484,000		25,722,013,000		25,822,013,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	4	22,840,101,000	4	23,804,271,000	4	24,804,484,000	4	25,722,013,000	4	25,822,013,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						2,979,807,000		10,422,981,000		9,245,981,000		13,068,981,000		15,401,981,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	2,979,807,000	1	10,422,981,000	1	9,245,981,000	1	13,068,981,000	1	15,401,981,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						823,100,000		1,204,757,000		1,214,757,000		1,024,757,000		2,034,757,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	20	20	823,100,000	20	1,204,757,000	20	1,214,757,000	20	1,024,757,000	20	2,034,757,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pemeliharaan Mebel *****						45,650,000		46,150,000		46,650,000		47,150,000		347,650,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	20	45,650,000	20	46,150,000	20	46,650,000	20	47,150,000	20	347,650,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						383,432,000		576,026,000		577,026,000		578,026,000		879,026,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	20	383,432,000	20	576,026,000	20	577,026,000	20	578,026,000	20	879,026,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****						122,936,000		223,936,000		224,936,000		725,936,000		726,936,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	122,936,000	1	223,936,000	1	224,936,000	1	725,936,000	1	726,936,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						903,500,000		3,570,423,000		3,080,423,000		4,590,423,000		4,900,423,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	2	903,500,000	4	3,570,423,000	4	3,080,423,000	4	4,590,423,000	4	4,900,423,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						271,189,000		2,371,689,000		2,172,189,000		3,372,689,000		3,573,189,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	4	271,189,000	4	2,371,689,000	4	2,172,189,000	4	3,372,689,000	4	3,573,189,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						330,000,000		2,330,000,000		1,830,000,000		2,630,000,000		2,840,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	4	330,000,000	4	2,330,000,000	4	1,830,000,000	4	2,630,000,000	4	2,840,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						712,950,000		969,122,000		976,971,000		1,182,134,000		1,758,757,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih ***	%	100	100	712,950,000	100	969,122,000	100	976,971,000	100	1,182,134,000	100	1,758,757,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						41,000,000		41,500,000		41,500,000		41,600,000		41,800,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi barang perangkat daerah	Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah ****	%	100	100	41,000,000	100	41,500,000	100	41,500,000	100	41,600,000	100	41,800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						1,000,000		1,500,000		1,500,000		1,600,000		1,800,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	N/A	1	1,000,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,600,000	1	1,800,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						110,000,000		145,000,000		146,092,000		174,898,000		197,722,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	110,000,000	100	145,000,000	100	146,092,000	100	174,898,000	100	197,722,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						10,000,000		13,500,000		13,609,000		16,466,000		18,771,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	10,000,000	1	13,500,000	1	13,609,000	1	16,466,000	1	18,771,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10,000,000		13,500,000		13,609,000		16,466,000		18,771,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	2	10,000,000	2	13,500,000	2	13,609,000	2	16,466,000	2	18,771,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						10,000,000		13,500,000		13,609,000		16,466,000		18,771,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	10,000,000	1	13,500,000	1	13,609,000	1	16,466,000	1	18,771,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						70,000,000		94,500,000		95,265,000		115,500,000		131,409,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	2	70,000,000	2	94,500,000	2	95,265,000	2	115,500,000	2	131,409,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						50,000,000		88,100,000		86,739,000		117,697,000		527,260,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	50,000,000	1	88,100,000	1	86,739,000	1	117,697,000	1	527,260,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						50,000,000		88,100,000		86,739,000		117,697,000		116,135,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	50,000,000	1	88,100,000	1	86,739,000	1	117,697,000	1	116,135,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		411,125,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	411,125,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						239,750,000		321,912,000		331,179,000		399,681,000		454,937,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	4	239,750,000	4	321,912,000	4	331,179,000	4	399,681,000	4	454,937,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						216,000,000		291,600,000		300,662,000		363,805,000		414,739,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	1	216,000,000	1	291,600,000	1	300,662,000	1	363,805,000	1	414,739,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						18,750,000		25,312,000		25,517,000		30,876,000		35,198,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	1	18,750,000	1	25,312,000	1	25,517,000	1	30,876,000	1	35,198,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						272,200,000		372,610,000		371,461,000		448,258,000		537,038,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	1	272,200,000	1	372,610,000	1	371,461,000	1	448,258,000	1	537,038,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						162,200,000		218,970,000		220,743,000		267,099,000		304,493,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	1	162,200,000	1	218,970,000	1	220,743,000	1	267,099,000	1	304,493,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Pemeliharaan Mebel *****						10,000,000		10,000,000		13,500,000		18,225,000		15,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	3	10,000,000	3	10,000,000	4	13,500,000	5	18,225,000	5	15,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						20,000,000		33,640,000		27,218,000		32,934,000		37,545,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	10	20,000,000	10	33,640,000	10	27,218,000	10	32,934,000	10	37,545,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						80,000,000		110,000,000		110,000,000		130,000,000		180,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	2	80,000,000	2	110,000,000	2	110,000,000	2	130,000,000	3	180,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						1,861,677,000		2,879,697,000		2,918,823,000		3,865,142,000		4,629,841,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang ***	%	100	100	1,861,677,000	100	2,879,697,000	100	2,918,823,000	100	3,865,142,000	100	4,629,841,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						42,000,000		57,120,000		57,582,000		69,675,000		79,429,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Meingkatnya Kualitas Layanan Administrasi Barang Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah ****	%	N/A	100	42,000,000	100	57,120,000	100	57,582,000	100	69,675,000	100	79,429,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						42,000,000		57,120,000		57,582,000		69,675,000		79,429,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	4	42,000,000	4	57,120,000	4	57,582,000	4	69,675,000	4	79,429,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						213,000,000		248,000,000		249,000,000		277,000,000		301,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	213,000,000	100	248,000,000	100	249,000,000	100	277,000,000	100	301,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						3,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	3,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						49,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	49,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						100,000,000		136,000,000		137,000,000		165,000,000		189,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	4	100,000,000	4	136,000,000	4	137,000,000	4	165,000,000	4	189,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						850,000,000		790,000,000		792,754,000		864,732,000		922,794,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	1	850,000,000	1	790,000,000	1	792,754,000	1	864,732,000	1	922,794,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						350,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	350,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						250,000,000		340,000,000		342,754,000		414,732,000		472,794,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	250,000,000	1	340,000,000	1	342,754,000	1	414,732,000	1	472,794,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						375,000,000		499,200,000		503,000,000		602,330,000		682,456,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	1	375,000,000	1	499,200,000	1	503,000,000	1	602,330,000	1	682,456,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	4	4,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						346,000,000		470,200,000		474,000,000		573,330,000		653,456,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	346,000,000	4	470,200,000	4	474,000,000	4	573,330,000	4	653,456,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						381,677,000		1,285,377,000		1,316,487,000		2,051,405,000		2,644,162,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	7	381,677,000	7	1,285,377,000	7	1,316,487,000	7	2,051,405,000	7	2,644,162,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Pemeliharaan Mebel *****						1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						150,000,000		738,377,000		765,081,000		1,384,834,000		1,884,692,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	150,000,000	1	738,377,000	1	765,081,000	1	1,384,834,000	1	1,884,692,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						228,677,000		544,000,000		548,406,000		663,571,000		756,470,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	228,677,000	1	544,000,000	1	548,406,000	1	663,571,000	1	756,470,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						1,436,110,000		2,013,726,000		2,063,105,000		2,496,361,000		2,845,852,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta ***	%	100	100	1,436,110,000	100	2,013,726,000	100	2,063,105,000	100	2,496,361,000	100	2,845,852,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Meingkatnya Kualitas Layanan Administrasi Barang Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah ****	%	N/A	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						98,024,000		103,024,000		108,024,000		108,024,000		108,024,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	98,024,000	100	103,024,000	100	108,024,000	100	108,024,000	100	108,024,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						12,810,000		12,810,000		12,810,000		12,810,000		12,810,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	12,810,000	1	12,810,000	1	12,810,000	1	12,810,000	1	12,810,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						20,783,000		20,783,000		20,783,000		20,783,000		20,783,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	20,783,000	1	20,783,000	1	20,783,000	1	20,783,000	1	20,783,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						4,008,000		4,008,000		4,008,000		4,008,000		4,008,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	4,008,000	1	4,008,000	1	4,008,000	1	4,008,000	1	4,008,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						10,423,000		10,423,000		10,423,000		10,423,000		10,423,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	4	10,423,000	4	10,423,000	4	10,423,000	4	10,423,000	4	10,423,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						40,000,000		45,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	4	40,000,000	4	45,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						550,000,000		775,000,000		775,000,000		1,000,000,000		1,250,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	100	550,000,000	100	775,000,000	100	775,000,000	100	1,000,000,000	100	1,250,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						530,000,000		755,000,000		755,000,000		980,000,000		1,230,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	4	4	530,000,000	4	755,000,000	4	755,000,000	4	980,000,000	4	1,230,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						251,568,000		251,568,000		251,568,000		251,568,000		251,568,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	100	251,568,000	100	251,568,000	100	251,568,000	100	251,568,000	100	251,568,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						1,568,000		1,568,000		1,568,000		1,568,000		1,568,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	4	1,568,000	4	1,568,000	4	1,568,000	4	1,568,000	4	1,568,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						531,518,000		879,134,000		923,513,000		1,131,769,000		1,231,260,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	100	531,518,000	100	879,134,000	100	923,513,000	100	1,131,769,000	100	1,231,260,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						55,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	1	55,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						50,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	4	50,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						190,880,000		190,880,000		190,880,000		190,880,000		190,880,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	4	4	190,880,000	4	190,880,000	4	190,880,000	4	190,880,000	4	190,880,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						225,638,000		558,254,000		602,633,000		810,889,000		910,380,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	225,638,000	1	558,254,000	1	602,633,000	1	810,889,000	1	910,380,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						1,280,500,000		1,701,480,000		1,714,453,000		2,050,608,000		2,326,976,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas ***	%	100	100	1,280,500,000	100	1,701,480,000	100	1,714,453,000	100	2,050,608,000	100	2,326,976,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						5,000,000		6,800,000		6,856,000		8,296,000		9,458,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Meingkatnya Kualitas Layanan Administrasi Barang Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah ****	%	100	100	5,000,000	100	6,800,000	100	6,856,000	100	8,296,000	100	9,458,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						5,000,000		6,800,000		6,856,000		8,296,000		9,458,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	4	4	5,000,000	4	6,800,000	4	6,856,000	4	8,296,000	4	9,458,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						323,500,000		439,960,000		443,526,000		536,666,000		611,802,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	323,500,000	100	439,960,000	100	443,526,000	100	536,666,000	100	611,802,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						5,000,000		6,800,000		6,856,000		8,296,000		9,458,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	5,000,000	1	6,800,000	1	6,856,000	1	8,296,000	1	9,458,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						250,000,000		340,000,000		342,754,000		414,732,000		472,795,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	250,000,000	1	340,000,000	1	342,754,000	1	414,732,000	1	472,795,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						8,500,000		11,560,000		11,653,000		14,100,000		16,075,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	8,500,000	1	11,560,000	1	11,653,000	1	14,100,000	1	16,075,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						4,000,000		5,440,000		5,485,000		6,637,000		7,567,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	4	4	4,000,000	4	5,440,000	4	5,485,000	4	6,637,000	4	7,567,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						6,000,000		8,160,000		8,227,000		9,955,000		11,349,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	4	4	6,000,000	4	8,160,000	4	8,227,000	4	9,955,000	4	11,349,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						50,000,000		68,000,000		68,551,000		82,946,000		94,558,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	4	4	50,000,000	4	68,000,000	4	68,551,000	4	82,946,000	4	94,558,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						230,000,000		276,800,000		278,231,000		315,659,000		345,849,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	230,000,000	1	276,800,000	1	278,231,000	1	315,659,000	1	345,849,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						10,000,000		13,600,000		13,710,000		16,589,000		18,911,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	10,000,000	1	13,600,000	1	13,710,000	1	16,589,000	1	18,911,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						10,000,000		13,600,000		13,710,000		16,589,000		18,911,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	10,000,000	1	13,600,000	1	13,710,000	1	16,589,000	1	18,911,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						100,000,000		136,000,000		137,101,000		165,892,000		189,116,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	100,000,000	1	136,000,000	1	137,101,000	1	165,892,000	1	189,116,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						10,000,000		13,600,000		13,710,000		16,589,000		18,911,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	10,000,000	1	13,600,000	1	13,710,000	1	16,589,000	1	18,911,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						225,000,000		306,000,000		308,479,000		370,379,000		425,515,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1	12	225,000,000	12	306,000,000	12	308,479,000	12	370,379,000	12	425,515,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						3,000,000		4,080,000		4,113,000		4,976,000		5,675,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	4	4	3,000,000	4	4,080,000	4	4,113,000	4	4,976,000	4	5,675,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						220,000,000		299,200,000		301,623,000		362,084,000		416,057,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	4	4	220,000,000	4	299,200,000	4	301,623,000	4	362,084,000	4	416,057,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						2,000,000		2,720,000		2,743,000		3,319,000		3,783,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	2,000,000	4	2,720,000	4	2,743,000	4	3,319,000	4	3,783,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						497,000,000		671,920,000		677,361,000		819,608,000		934,352,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	497,000,000	1	671,920,000	1	677,361,000	1	819,608,000	1	934,352,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						25,000,000		34,000,000		34,275,000		41,472,000		47,278,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	1	1	25,000,000	1	34,000,000	1	34,275,000	1	41,472,000	1	47,278,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Pemeliharaan Mebel *****						2,000,000		2,720,000		2,742,000		3,318,000		3,782,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	2,000,000	1	2,720,000	1	2,742,000	1	3,318,000	1	3,782,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						45,000,000		61,200,000		61,695,000		74,652,000		85,103,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	45,000,000	1	61,200,000	1	61,695,000	1	74,652,000	1	85,103,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						400,000,000		540,000,000		544,374,000		658,692,000		750,909,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	400,000,000	1	540,000,000	1	544,374,000	1	658,692,000	1	750,909,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						25,000,000		34,000,000		34,275,000		41,474,000		47,280,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	25,000,000	1	34,000,000	1	34,275,000	1	41,474,000	1	47,280,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						799,400,000		1,087,184,000		1,095,990,000		1,326,147,000		1,511,807,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman ***	%	100	100	799,400,000	100	1,087,184,000	100	1,095,990,000	100	1,326,147,000	100	1,511,807,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						26,900,000		35,850,000		36,616,000		44,312,000		50,528,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Meingkatnya Kualitas Layanan Administrasi Barang Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah ****	%	100	100	26,900,000	100	35,850,000	100	36,616,000	100	44,312,000	100	50,528,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						25,000,000		33,750,000		34,031,000		41,185,000		46,964,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	4	25,000,000	4	33,750,000	4	34,031,000	4	41,185,000	4	46,964,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						1,900,000		2,100,000		2,585,000		3,127,000		3,564,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	N/A	4	1,900,000	4	2,100,000	4	2,585,000	4	3,127,000	4	3,564,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						82,500,000		119,369,000		120,334,000		145,604,000		165,978,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	82,500,000	100	119,369,000	100	120,334,000	100	145,604,000	100	165,978,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						20,000,000		34,994,000		35,278,000		42,691,000		48,659,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	20,000,000	4	34,994,000	4	35,278,000	4	42,691,000	4	48,659,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						20,000,000		27,000,000		27,218,000		32,933,000		37,543,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	20,000,000	4	27,000,000	4	27,218,000	4	32,933,000	4	37,543,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10,000,000		13,500,000		13,609,000		16,466,000		18,771,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	10,000,000	4	13,500,000	4	13,609,000	4	16,466,000	4	18,771,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						15,000,000		20,250,000		20,414,000		24,700,000		28,158,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	15,000,000	4	20,250,000	4	20,414,000	4	24,700,000	4	28,158,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						1,500,000		2,025,000		2,041,000		2,469,000		2,814,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	4	1,500,000	4	2,025,000	4	2,041,000	4	2,469,000	4	2,814,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						15,000,000		20,250,000		20,414,000		24,700,000		28,158,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	4	15,000,000	4	20,250,000	4	20,414,000	4	24,700,000	4	28,158,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						1,000,000		1,350,000		1,360,000		1,645,000		1,875,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	4	1,000,000	4	1,350,000	4	1,360,000	4	1,645,000	4	1,875,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						15,000,000		20,250,000		20,414,000		24,700,000		28,158,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	1	15,000,000	1	20,250,000	1	20,414,000	1	24,700,000	1	28,158,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						15,000,000		20,250,000		20,414,000		24,700,000		28,158,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	4	15,000,000	4	20,250,000	4	20,414,000	4	24,700,000	4	28,158,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						454,000,000		612,900,000		617,862,000		747,610,000		852,274,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	12	454,000,000	12	612,900,000	12	617,862,000	12	747,610,000	12	852,274,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						10,000,000		13,500,000		13,609,000		16,466,000		18,771,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	4	10,000,000	4	13,500,000	4	13,609,000	4	16,466,000	4	18,771,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						424,000,000		572,400,000		577,035,000		698,211,000		795,960,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	424,000,000	4	572,400,000	4	577,035,000	4	698,211,000	4	795,960,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						20,000,000		27,000,000		27,218,000		32,933,000		37,543,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	20,000,000	4	27,000,000	4	27,218,000	4	32,933,000	4	37,543,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						221,000,000		298,815,000		300,764,000		363,921,000		414,869,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	1	221,000,000	1	298,815,000	1	300,764,000	1	363,921,000	1	414,869,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						1,000,000		1,350,000		1,360,000		1,645,000		1,875,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	1	1,000,000	1	1,350,000	1	1,360,000	1	1,645,000	1	1,875,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Pemeliharaan Mebel *****						5,000,000		6,750,000		6,804,000		8,232,000		9,384,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	4	5,000,000	4	6,750,000	4	6,804,000	4	8,232,000	4	9,384,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						15,000,000		20,250,000		20,414,000		24,700,000		28,158,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	4	15,000,000	4	20,250,000	4	20,414,000	4	24,700,000	4	28,158,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						100,000,000		135,000,000		136,093,000		164,672,000		187,726,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	4	100,000,000	4	135,000,000	4	136,093,000	4	164,672,000	4	187,726,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						100,000,000		135,465,000		136,093,000		164,672,000		187,726,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	4	100,000,000	4	135,465,000	4	136,093,000	4	164,672,000	4	187,726,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						903,000,000		956,080,000		1,238,027,000		1,498,120,000		1,707,733,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelatihan Pertanian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian ***	%	100	100	903,000,000	100	956,080,000	100	1,238,027,000	100	1,498,120,000	100	1,707,733,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Meingkatnya Kualitas Layanan Administrasi Barang Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah ****	%	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						126,500,000		139,080,000		157,000,000		180,000,000		233,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	1	1	126,500,000	1	139,080,000	1	157,000,000	1	180,000,000	1	233,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		40,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	20,000,000	4	25,000,000	4	30,000,000	4	35,000,000	4	40,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						20,000,000		23,080,000		25,000,000		35,000,000		40,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	20,000,000	4	23,080,000	4	25,000,000	4	35,000,000	4	40,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						2,000,000		3,000,000		4,000,000		5,000,000		6,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	2,000,000	4	3,000,000	4	4,000,000	4	5,000,000	4	6,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						12,000,000		12,000,000		17,000,000		19,000,000		21,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	4	12,000,000	4	12,000,000	4	17,000,000	4	19,000,000	4	21,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						71,500,000		75,000,000		80,000,000		85,000,000		125,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	4	71,500,000	4	75,000,000	4	80,000,000	4	85,000,000	4	125,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						105,000,000		110,000,000		223,527,000		275,000,000		326,233,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	105,000,000	1	110,000,000	1	223,527,000	1	275,000,000	1	326,233,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		50,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						10,000,000		10,000,000		10,000,000		40,000,000		50,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						75,000,000		75,000,000		183,527,000		200,000,000		226,233,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	75,000,000	1	75,000,000	1	183,527,000	1	200,000,000	1	226,233,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						251,500,000		262,000,000		272,500,000		283,000,000		303,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusu ****	Laporan	12	12	251,500,000	12	262,000,000	12	272,500,000	12	283,000,000	12	303,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						1,500,000		2,000,000		2,500,000		3,000,000		3,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	4	1,500,000	4	2,000,000	4	2,500,000	4	3,000,000	4	3,500,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						250,000,000		260,000,000		270,000,000		280,000,000		300,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	250,000,000	4	260,000,000	4	270,000,000	4	280,000,000	4	300,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						415,000,000		440,000,000		580,000,000		755,120,000		840,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	415,000,000	1	440,000,000	1	580,000,000	1	755,120,000	1	840,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						60,000,000		70,000,000		85,000,000		105,000,000		120,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	1	60,000,000	1	70,000,000	1	85,000,000	1	105,000,000	1	120,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Pemeliharaan Mebel *****						10,000,000		15,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	1	10,000,000	1	15,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						50,000,000		60,000,000		75,000,000		80,000,000		90,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	7	50,000,000	7	60,000,000	7	75,000,000	7	80,000,000	7	90,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						100,000,000		100,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						195,000,000		195,000,000		195,000,000		340,120,000		395,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	195,000,000	1	195,000,000	1	195,000,000	1	340,120,000	1	395,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
								1,910,316,000		2,224,252,000		2,319,657,000		2,668,036,000		2,653,143,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah ***	%	100	100	1,910,316,000	100	2,224,252,000	100	2,319,657,000	100	2,668,036,000	100	2,653,143,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						347,396,000		403,802,000		399,207,000		472,586,000		507,693,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	347,396,000	100	403,802,000	100	399,207,000	100	472,586,000	100	507,693,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						15,000,000		19,305,000		5,893,000		7,365,000		10,267,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	15,000,000	1	19,305,000	1	5,893,000	1	7,365,000	1	10,267,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10,000,000		10,000,000		10,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						144,905,000		186,497,000		188,314,000		250,221,000		282,426,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	144,905,000	1	186,497,000	1	188,314,000	1	250,221,000	1	282,426,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						17,491,000		18,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	17,491,000	1	18,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						20,000,000		25,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						5,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	12	12	5,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						348,000,000		400,000,000		400,000,000		600,000,000		600,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	348,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****						200,000,000		250,000,000		250,000,000		350,000,000		350,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	200,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Pengadaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						48,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	48,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						319,650,000		345,450,000		345,450,000		345,450,000		345,450,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1	1	319,650,000	1	345,450,000	1	345,450,000	1	345,450,000	1	345,450,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						275,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	275,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						15,450,000		15,450,000		15,450,000		15,450,000		15,450,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	1	15,450,000	1	15,450,000	1	15,450,000	1	15,450,000	1	15,450,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						24,200,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	1	24,200,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						895,270,000		1,075,000,000		1,175,000,000		1,250,000,000		1,200,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	895,270,000	1	1,075,000,000	1	1,175,000,000	1	1,250,000,000	1	1,200,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						75,000,000		75,000,000		75,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						200,000,000		250,000,000		250,000,000		300,000,000		250,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	200,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	1	250,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****						370,270,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	370,270,000	N/A	400,000,000	N/A	400,000,000	N/A	400,000,000	N/A	400,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						200,000,000		300,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	200,000,000	1	300,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						3,566,336,000		5,713,628,000		5,713,629,000		6,680,385,000		7,637,050,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah ***	%	100	100	3,566,336,000	100	5,713,628,000	100	5,713,629,000	100	6,680,385,000	100	7,637,050,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						920,001,000		1,261,028,000		1,261,029,000		1,530,785,000		1,630,450,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	920,001,000	100	1,261,028,000	100	1,261,029,000	100	1,530,785,000	100	1,630,450,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						50,000,000		75,000,000		75,000,000		76,000,000		80,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	50,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	76,000,000	1	80,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						75,000,000		120,000,000		120,000,000		130,000,000		135,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	75,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000	1	135,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						80,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	80,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						250,001,000		291,028,000		291,029,000		451,929,000		481,450,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	250,001,000	1	291,028,000	1	291,029,000	1	451,929,000	1	481,450,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						100,000,000		150,000,000		150,000,000		185,000,000		190,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	100,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	185,000,000	1	190,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						50,000,000		110,000,000		110,000,000		120,000,000		125,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	50,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	120,000,000	1	125,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						300,000,000		400,000,000		400,000,000		450,000,000		500,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	300,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	12	450,000,000	12	500,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						15,000,000		15,000,000		15,000,000		17,856,000		19,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	12	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	17,856,000	12	19,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						1,000,000,000		2,300,000,000		2,300,000,000		2,425,000,000		2,650,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	1,000,000,000	1	2,300,000,000	1	2,300,000,000	1	2,425,000,000	1	2,650,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****						350,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,025,000,000		1,150,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	350,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,025,000,000	1	1,150,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Pengadaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						300,000,000		500,000,000		500,000,000		600,000,000		600,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	300,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						350,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		900,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	350,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	900,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						405,925,000		432,600,000		432,600,000		433,600,000		466,600,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1	1	405,925,000	1	432,600,000	1	432,600,000	1	433,600,000	1	466,600,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						6,325,000		6,000,000		6,000,000		7,000,000		10,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	6,325,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	7,000,000	12	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						363,000,000		380,000,000		380,000,000		380,000,000		390,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	363,000,000	12	380,000,000	12	380,000,000	12	380,000,000	12	390,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						30,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		60,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	30,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	60,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						6,600,000		6,600,000		6,600,000		6,600,000		6,600,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	1	6,600,000	1	6,600,000	1	6,600,000	1	6,600,000	1	6,600,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						1,240,410,000		1,720,000,000		1,720,000,000		2,291,000,000		2,890,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	1,240,410,000	1	1,720,000,000	1	1,720,000,000	1	2,291,000,000	1	2,890,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						140,410,000		170,000,000		170,000,000		170,000,000		200,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	140,410,000	1	170,000,000	1	170,000,000	1	170,000,000	1	200,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						200,000,000		300,000,000		300,000,000		341,000,000		400,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	200,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	341,000,000	1	400,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****						500,000,000		400,000,000		400,000,000		500,000,000		600,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	500,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	500,000,000	1	600,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						350,000,000		800,000,000		800,000,000		1,200,000,000		1,600,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	350,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	1,200,000,000	1	1,600,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						50,000,000		50,000,000		50,000,000		80,000,000		90,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						1,491,000,000		1,491,000,000		1,491,000,000		1,491,000,000		2,170,375,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian ***	%	N/A	100	1,491,000,000	100	1,491,000,000	100	1,491,000,000	100	1,491,000,000	100	2,170,375,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Meingkatnya Kualitas Layanan Administrasi Barang Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah ****	%	N/A	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	N/A	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	N/A	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						276,000,000		276,000,000		276,000,000		276,000,000		276,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	276,000,000	100	276,000,000	100	276,000,000	100	276,000,000	100	276,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						330,000,000		330,000,000		330,000,000		330,000,000		1,009,375,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	1	330,000,000	1	330,000,000	1	330,000,000	1	330,000,000	1	1,009,375,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		779,375,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	779,375,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						375,000,000		375,000,000		375,000,000		375,000,000		375,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	12	375,000,000	12	375,000,000	12	375,000,000	12	375,000,000	12	375,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						460,000,000		460,000,000		460,000,000		460,000,000		460,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	1	460,000,000	1	460,000,000	1	460,000,000	1	460,000,000	1	460,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pemeliharaan Mebel *****						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						2,342,650,000		3,016,210,000		3,046,454,000		3,512,214,000		3,936,442,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah ***	%	100	100	2,342,650,000	100	3,016,210,000	100	3,046,454,000	100	3,512,214,000	100	3,936,442,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						370,450,000		495,010,000		522,254,000		650,014,000		750,242,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	370,450,000	100	495,010,000	100	522,254,000	100	650,014,000	100	750,242,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						35,000,000		50,000,000		50,000,000		60,000,000		80,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	35,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	60,000,000	1	80,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						25,000,000		45,000,000		45,000,000		50,000,000		55,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	25,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						15,450,000		20,000,000		20,000,000		25,000,000		30,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	1	15,450,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						50,000,000		70,000,000		70,250,000		85,000,000		90,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	50,000,000	1	70,000,000	1	70,250,000	1	85,000,000	1	90,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						35,000,000		50,000,000		50,000,000		70,000,000		80,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	35,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	70,000,000	1	80,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						45,000,000		70,000,000		70,000,000		90,000,000		95,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	1	45,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	90,000,000	1	95,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						150,000,000		175,010,000		200,004,000		250,014,000		300,242,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	150,000,000	12	175,010,000	12	200,004,000	12	250,014,000	12	300,242,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						15,000,000		15,000,000		17,000,000		20,000,000		20,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	12	12	15,000,000	12	15,000,000	12	17,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						780,000,000		875,000,000		875,000,000		955,000,000		1,080,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	780,000,000	1	875,000,000	1	875,000,000	1	955,000,000	1	1,080,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****						450,000,000		500,000,000		500,000,000		535,000,000		600,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	450,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	535,000,000	1	600,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Pengadaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						250,000,000		275,000,000		275,000,000		300,000,000		350,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	250,000,000	1	275,000,000	1	275,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						80,000,000		100,000,000		100,000,000		120,000,000		130,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	80,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						637,200,000		687,200,000		689,200,000		742,200,000		751,200,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	1	1	637,200,000	1	687,200,000	1	689,200,000	1	742,200,000	1	751,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						5,000,000		5,000,000		7,000,000		10,000,000		13,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	5,000,000	12	5,000,000	12	7,000,000	12	10,000,000	12	13,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						550,000,000		575,000,000		575,000,000		590,000,000		590,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	550,000,000	12	575,000,000	12	575,000,000	12	590,000,000	12	590,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						75,000,000		100,000,000		100,000,000		135,000,000		141,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	135,000,000	1	141,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						7,200,000		7,200,000		7,200,000		7,200,000		7,200,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	1	7,200,000	1	7,200,000	1	7,200,000	1	7,200,000	1	7,200,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						555,000,000		959,000,000		960,000,000		1,165,000,000		1,355,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	555,000,000	1	959,000,000	1	960,000,000	1	1,165,000,000	1	1,355,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						50,000,000		80,000,000		80,000,000		90,000,000		100,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	50,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	1	100,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						150,000,000		300,000,000		300,000,000		320,000,000		350,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	150,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	320,000,000	1	350,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****						10,000,000		14,000,000		15,000,000		20,000,000		30,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	1	10,000,000	1	14,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	30,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						300,000,000		500,000,000		500,000,000		650,000,000		780,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	300,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	650,000,000	1	780,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						30,000,000		50,000,000		50,000,000		70,000,000		80,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	30,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	70,000,000	1	80,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan **							1,388,713,000		1,492,858,000		1,513,859,000		3,634,858,000		5,261,858,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan **	Angka	2.75	2.9	1,388,713,000	2.95	1,492,858,000	3	1,513,859,000	3.05	3,634,858,000	3.15	5,261,858,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						1,388,713,000		1,492,858,000		1,513,859,000		3,634,858,000		5,261,858,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan ***	%	100	100	1,388,713,000	100	1,492,858,000	100	1,513,859,000	100	3,634,858,000	100	5,261,858,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****						1,388,713,000		1,492,858,000		1,513,859,000		3,634,858,000		5,261,858,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	1,388,713,000	100	1,492,858,000	100	1,513,859,000	100	3,634,858,000	100	5,261,858,000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****						709,200,000		744,700,000		765,201,000		1,885,700,000		2,514,200,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	1	4	709,200,000	4	744,700,000	4	765,201,000	4	1,885,700,000	4	2,514,200,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****						679,513,000		748,158,000		748,658,000		1,749,158,000		2,747,658,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	1	4	679,513,000	4	748,158,000	4	748,658,000	4	1,749,158,000	4	2,747,658,000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Pertanian dan Peternakan
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian *								256,523,028,000		313,205,911,000		315,444,384,000		360,474,598,000		396,709,555,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
				Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor pertanian *	%	1.17	1.05		1.06		1.07		1.08		1.09		Dinas Pertanian dan Peternakan	
	Meningkatnya Produksi Pertanian **							209,469,723,000		253,342,226,000		255,005,658,000		290,872,236,000		318,348,738,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
				Produksi Tanaman Pangan **	Ton	12248637	1E+07	141,131,579,000	12842028	178,478,976,000	12950425	179,604,741,000	13059794	210,334,046,000	13170147	234,060,164,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						11,374,950,000		14,851,595,000		14,960,214,000		17,799,106,000		20,089,146,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi ***	Ton	8891297	9E+06	6,899,028,000	9474619	9,079,090,000	9569366	9,147,201,000	9665059	10,927,354,000	9761710	12,363,345,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ****						6,899,028,000		9,079,090,000		9,147,201,000		10,927,354,000		12,363,345,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya Padi ****	Ha	2765	15800	6,899,028,000	16700	9,079,090,000	17700	9,147,201,000	18700	10,927,354,000	19700	12,363,345,000	Pokja Padi	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian *****						48,293,196,000		63,553,630,000		64,030,407,000		76,491,478,000		86,543,415,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian *****	Laporan	N/A	4	6,899,028,000	4	9,079,090,000	4	9,147,201,000	4	10,927,354,000	4	12,363,345,000	Pokja Padi	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Jagung ***	Ton	3282384	3E+06	2,753,630,000	3314594	3,502,164,000	3328191	3,525,550,000	3341814	4,136,774,000	3355463	4,629,828,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ****						2,753,630,000		3,502,164,000		3,525,550,000		4,136,774,000		4,629,828,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya Jagung dan serealia ****	Ha	N/A	2500	2,753,630,000	2600	3,502,164,000	2700	3,525,550,000	2800	4,136,774,000	2900	4,629,828,000	Pokja Palawija	
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian *****						19,275,410,000		24,515,148,000		24,678,850,000		28,957,418,000		32,408,796,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (jagung dan serealia) *****	Laporan	N/A	4	2,753,630,000	4	3,502,164,000	4	3,525,550,000	4	4,136,774,000	4	4,629,828,000	Pokja Palawija	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Kedelai ***	Ton	74956	52790	1,722,292,000	52815	2,270,341,000	52868	2,287,463,000	52921	2,734,978,000	52974	3,095,973,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ****						1,722,292,000		2,270,341,000		2,287,463,000		2,734,978,000		3,095,973,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya Kedelai, Aneka kacang dan Umbi ****	Ha	200	700	1,722,292,000	700	2,270,341,000	700	2,287,463,000	700	2,734,978,000	700	3,095,973,000	Pokja Palawija	
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian *****						12,056,044,000		15,892,387,000		16,012,241,000		19,144,846,000		21,671,811,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (kedelai, aneka kacang dan umbi) *****	Laporan	N/A	4	1,722,292,000	4	2,270,341,000	4	2,287,463,000	4	2,734,978,000	4	3,095,973,000	Pokja Palawija	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						1,536,075,000		1,721,000,000		1,731,000,000		2,315,000,000		2,415,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman pangan ***	%	100	100	1,536,075,000	100	1,721,000,000	100	1,731,000,000	100	2,315,000,000	100	2,415,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ****						1,536,075,000		1,721,000,000		1,731,000,000		2,315,000,000		2,415,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan ****	Ton	754	1000	154,500,000	1300	170,500,000	1600	170,500,000	1900	190,000,000	2200	190,000,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih *****						927,000,000		1,023,000,000		1,023,000,000		1,140,000,000		1,140,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah pengujian mutu sertifikasi benih tanaman pangan *****	Sertifikat	N/A	1500	154,500,000	1545	170,500,000	1590	170,500,000	1635	190,000,000	1680	190,000,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah pengawasan peredaran benih tanaman pangan ****	Bulan	12	12	422,860,000	12	510,000,000	12	520,000,000	12	740,000,000	12	790,000,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan *****						422,860,000		510,000,000		520,000,000		740,000,000		790,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. (tanaman pangan) *****	Laporan	N/A	12	422,860,000	12	510,000,000	12	520,000,000	12	740,000,000	12	790,000,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan ****	Ton	19773	20800	958,715,000	20900	1,040,500,000	21000	1,040,500,000	21100	1,385,000,000	21200	1,435,000,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih *****						5,752,290,000		6,243,000,000		6,243,000,000		8,310,000,000		8,610,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih tanaman pangan *****	Ha	N/A	5200	803,115,000	5225	875,000,000	5250	875,000,000	5275	1,200,000,000	5300	1,250,000,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
			Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Luas sertifikasi benih tanaman pangan lainnya *****	Ha	N/A	390	155,600,000	395	165,500,000	400	165,500,000	405	185,000,000	410	185,000,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						2,167,823,000		2,167,823,000		2,167,823,000		2,167,823,000		2,167,823,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman pangan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang ***	%	100	100	2,167,823,000	100	2,167,823,000	100	2,167,823,000	100	2,167,823,000	100	2,167,823,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ****						2,167,823,000		2,167,823,000		2,167,823,000		2,167,823,000		2,167,823,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih tanaman padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat ****	Ton	N/A	212.2	2,167,823,000	212.2	2,167,823,000	212.2	2,167,823,000	212.2	2,167,823,000	212.2	2,167,823,000	Pokja Tanaman Pangan	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih *****						2,167,823,000		2,167,823,000		2,167,823,000		2,167,823,000		2,167,823,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak *****	Ton	N/A	209	2,108,323,000	209	2,108,323,000	209	2,108,323,000	209	2,108,323,000	209	2,108,323,000	Pokja Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
			Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat *****	Ton	N/A	3.2	59,500,000	3.2	59,500,000	3.2	59,500,000	3.2	59,500,000	3.2	59,500,000	Pokja Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						3,279,967,000		4,460,755,000		4,463,820,000		5,401,222,000		6,157,393,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta ***	%	100	100	3,279,967,000	100	4,460,755,000	100	4,463,820,000	100	5,401,222,000	100	6,157,393,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ****						3,279,967,000		4,460,755,000		4,463,820,000		5,401,222,000		6,157,393,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih sayuran ****	Ton	N/A	3	2,909,967,000	4	3,961,255,000	4	3,960,276,000	4	4,791,932,000	4	5,462,803,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang *****						1,615,562,000		2,213,809,000		2,198,675,000		2,660,395,000		3,032,851,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak *****	Batang	N/A	30000	902,537,000	30000	1,251,226,000	30000	1,228,295,000	30000	1,486,236,000	30000	1,694,309,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
			Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi yang diperbanyak *****	Ton	N/A	1.8	548,025,000	2.4	739,833,000	2.4	745,826,000	2.4	902,449,000	2.4	1,028,792,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
			Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan *****	Batang	2400	3000	165,000,000	3000	222,750,000	3000	224,554,000	3000	271,710,000	3000	309,750,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih *****						1,294,405,000		1,747,446,000		1,761,601,000		2,131,537,000		2,429,952,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak *****	Ton	N/A	115.6	1,294,405,000	134.6	1,747,446,000	153.6	1,761,601,000	191.6	2,131,537,000	191.6	2,429,952,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih tanaman semusim ****	Mata	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh *****	Mata	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih tanaman tahunan ****	Batang	N/A	N/A	185,000,000	N/A	249,750,000	N/A	251,772,000	N/A	304,645,000	N/A	347,295,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang *****						185,000,000		249,750,000		251,772,000		304,645,000		347,295,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang *****	Batang	N/A	225	185,000,000	250	249,750,000	275	251,772,000	300	304,645,000	325	347,295,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar ****	Batang	N/A	0.5	185,000,000	0.5	249,750,000	0.5	251,772,000	0.5	304,645,000	0.5	347,295,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek *****						185,000,000		249,750,000		251,772,000		304,645,000		347,295,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
			Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek *****	Setek	N/A	25000	185,000,000	25000	249,750,000	25000	251,772,000	25000	304,645,000	25000	347,295,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						3,495,267,000		4,789,563,000		4,829,167,000		5,864,291,000		6,699,290,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas ***	%	100	100	3,495,267,000	100	4,789,563,000	100	4,829,167,000	100	5,864,291,000	100	6,699,290,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ****						3,495,267,000		4,789,563,000		4,829,167,000		5,864,291,000		6,699,290,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat ****	Ton	N/A	41	1,368,500,000	46	1,861,160,000	51	1,876,236,000	56	2,270,246,000	61	2,588,080,000	Pokja Tanaman Pangan	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih *****						1,368,500,000		1,861,160,000		1,876,236,000		2,270,246,000		2,588,080,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak *****	Ton	N/A	40	1,350,500,000	45	1,836,680,000	50	1,851,557,000	55	2,240,384,000	60	2,554,038,000	Pokja Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
			Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan lainnya berbentuk biji/benih yang diperbanyak *****	Ton	N/A	1	18,000,000	1	24,480,000	1	24,679,000	1	29,862,000	1	34,042,000	Pokja Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih tanaman buah ****	Batang	N/A	5000	852,348,000	6000	1,159,193,000	7000	1,168,582,000	8000	1,413,984,000	8000	1,611,940,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang *****						1,704,696,000		2,318,386,000		2,337,164,000		2,827,968,000		3,223,880,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan *****	Batang	N/A	12725	852,348,000	12725	1,159,193,000	12725	1,168,582,000	12725	1,413,984,000	12725	1,611,940,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk hortikultura ****	Batang	N/A	12725	196,500,000	12725	267,240,000	12725	269,404,000	12725	325,978,000	12725	371,616,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang *****						393,000,000		534,480,000		538,808,000		651,956,000		743,232,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak *****	Batang	N/A	5000	45,000,000	6000	61,200,000	7000	61,696,000	8000	74,652,000	9000	85,103,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
			Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah produksi tanaman hias yang dihasilkan *****	Batang	N/A	12000	151,500,000	12000	206,040,000	12000	207,708,000	12000	251,326,000	12000	286,513,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih tanaman semusim ****	Mata	N/A	N/A	96,000,000	N/A	130,560,000	0.5	131,617,000	3.5	159,256,000	18.5	181,552,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh *****						96,000,000		130,560,000		131,617,000		159,256,000		181,552,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh *****	Mata	N/A	34500	96,000,000	34500	130,560,000	34500	131,617,000	34500	159,256,000	34500	181,552,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih tanaman tahunan ****	Batang	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang *****						0		0		0		0		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang *****	Batang	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih rempah penyegar ****	Setek	N/A	1	981,919,000	1	1,371,410,000	1	1,383,328,000	1	1,694,827,000	1	1,946,102,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek *****						981,919,000		1,371,410,000		1,383,328,000		1,694,827,000		1,946,102,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
			Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek *****	Setek	N/A	1.5	130,000,000	1.5	176,800,000	1.5	178,233,000	1.5	215,662,000	1.5	245,855,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
			Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah pohon tanaman produksi perkebunan yang dipelihara *****	Ha	N/A	67	851,919,000	67	1,194,610,000	67	1,205,095,000	67	1,479,165,000	67	1,700,247,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						1,542,000,000		3,046,480,000		3,084,990,000		4,167,848,000		4,360,594,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Meningkatnya Pengembangan Mekanisasi dan modernisasi Pertanian	Persentase capaian alsintan dan pengelola alsintan yang diawasi ***	%	N/A	3	700,000,000	3	981,910,000	3	974,833,000	3	1,179,547,000	3	1,344,684,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ****						700,000,000		981,910,000		974,833,000		1,179,547,000		1,344,684,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran alsintan serta pengelola alsintan ****	Dokumen	N/A	12	700,000,000	12	981,910,000	12	974,833,000	12	1,179,547,000	12	1,344,684,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian *****						1,400,000,000		1,963,820,000		1,949,666,000		2,359,094,000		2,689,368,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah laporan pengawasan alsintan dan pengembangan pengelola alsintan *****	Laporan	N/A	4	700,000,000	4	981,910,000	4	974,833,000	4	1,179,547,000	4	1,344,684,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
			Meningkatnya Pengembangan Mekanisasi dan modernisasi Pertanian	Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan ***	%	N/A	100	842,000,000	100	2,064,570,000	100	2,110,157,000	100	2,988,301,000	100	3,015,910,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ****						842,000,000		2,064,570,000		2,110,157,000		2,988,301,000		3,015,910,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah rekayasa dan pengembangan alsintan ****	Dokumen	N/A	1	842,000,000	1	2,064,570,000	1	2,110,157,000	1	2,988,301,000	1	3,015,910,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian *****						1,684,000,000		4,129,140,000		4,220,314,000		5,976,602,000		6,031,820,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
			Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah laporan rekomendasi rekayasa teknis alsintan *****	Dokumen	N/A	5	842,000,000	5	2,064,570,000	5	2,110,157,000	5	2,988,301,000	5	3,015,910,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ***						116,135,497,000		145,241,760,000		146,151,120,000		169,918,160,000		189,090,238,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana sarana pertanian ***	%	1	1	116,135,497,000	1	145,241,760,000	1	146,151,120,000	1	169,918,160,000	1	189,090,238,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana	
		Penataan Prasarana Pertanian ****						116,135,497,000		145,241,760,000		146,151,120,000		169,918,160,000		189,090,238,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana	
			Terselanggaranya Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	jumlah fasilitasi pupuk non subsidi/pembenah tanah ****	Ha	N/A	14800	5,599,950,000	17500	6,763,700,000	18000	6,800,058,000	20000	7,750,330,000	22000	8,516,885,000	Seksi Sarana	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya *****						22,399,800,000		27,054,800,000		27,200,232,000		31,001,320,000		34,067,540,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana	
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya *****	Laporan	N/A	4	5,599,950,000	4	6,763,700,000	4	6,800,058,000	4	7,750,330,000	4	8,516,885,000	Seksi Sarana	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana
			Terselanggaranya Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	jumlah kelembagaan pengelola alsintan ****	Unit	769	240	34,419,581,000	243	38,182,081,000	245	38,299,632,000	248	41,371,943,000	250	43,850,273,000	Seksi Alat Mesin	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya *****						137,678,324,000		152,728,324,000		153,198,528,000		165,487,772,000		175,401,092,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana	
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan penataan sarana pendukung pertanian lainnya (alsintan) *****	Dokumen	N/A	4	34,419,581,000	4	38,182,081,000	4	38,299,632,000	4	41,371,943,000	4	43,850,273,000	Seksi Alat Mesin	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana
			Terselanggaranya Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	jumlah luasan lahan yang dioptimasi ****	Ha	N/A	25	305,000,000	35	411,750,000	35	415,085,000	50	502,253,000	50	572,568,000	Seksi Sarana	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya *****						1,220,000,000		1,647,000,000		1,660,340,000		2,009,012,000		2,290,272,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah stimulan pupuk mendukung optimasi lahan *****	Kg	N/A	45000	78,750,000	63000	110,250,000	63000	110,250,000	90000	157,500,000	90000	157,500,000	Seksi Sarana	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah stimulan benih mendukung optimasi lahan *****	Kg	N/A	700	226,250,000	980	301,500,000	980	304,835,000	1400	344,753,000	1400	415,068,000	Seksi Sarana	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana
			Terselanggaranya Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	jumlah jaringan irigasi tersier yang difasilitasi ****	Paket	N/A	300	62,759,977,000	300	84,594,989,000	300	85,277,177,000	300	103,106,797,000	300	117,489,357,000	Seksi Prasarana	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani *****						125,519,954,000		169,189,978,000		170,554,354,000		206,213,594,000		234,978,714,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana	
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani (irigasi tersier) *****	Dokumen	N/A	4	62,759,977,000	4	84,594,989,000	4	85,277,177,000	4	103,106,797,000	4	117,489,357,000	Seksi Prasarana	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana
			Terselanggaranya Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah jaringan irigasi alternatif yang difasilitasi ****	Paket	N/A	15	13,050,989,000	28	15,289,240,000	28	15,359,168,000	28	17,186,837,000	28	18,661,155,000	Seksi Prasarana	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani *****						26,101,978,000		30,578,480,000		30,718,336,000		34,373,674,000		37,322,310,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana	
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani *****	Dokumen	N/A	4	13,050,989,000	4	15,289,240,000	4	15,359,168,000	4	17,186,837,000	4	18,661,155,000	Seksi Prasarana	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN ***						1,600,000,000		2,200,000,000		2,216,607,000		2,700,596,000		3,080,680,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan ***	%	24.89	20	1,500,000,000	15	2,050,000,000	15	2,066,607,000	15	2,500,596,000	15	2,850,680,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi ****						1,500,000,000		2,050,000,000		2,066,607,000		2,500,596,000		2,850,680,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luas pengendalian serangan OPT komoditas tanaman pangan ****	Ha	34.557	4E+06	1,500,000,000	3774084	2,050,000,000	3548394	2,066,607,000	3336200	2,500,596,000	3136695	2,850,680,000	Pokja Perlindungan Tanaman Pangan	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan *****						4,500,000,000		6,150,000,000		6,199,821,000		7,501,788,000		8,552,040,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan *****	Ha	40.359	45629	1,500,000,000	43078.5	2,050,000,000	40675.2	2,066,607,000	38410.9	2,500,596,000	36277.4	2,850,680,000	Pokja Perlindungan Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
			Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan ***	%	1.98	5	100,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	200,000,000	5	230,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi ****						100,000,000		150,000,000		150,000,000		200,000,000		230,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah gerakan penanganan DPI Komoditas Tanaman Pangan ****	Unit	N/A	29	100,000,000	29	150,000,000	29	150,000,000	29	200,000,000	29	230,000,000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan *****						300,000,000		450,000,000		450,000,000		600,000,000		690,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani *****	Ha	N/A	145	100,000,000	145	150,000,000	145	150,000,000	145	200,000,000	145	230,000,000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
				Produksi Tanaman Hortikultura **	Ton	1057770	1E+06	6,602,253,000	1089741	9,033,297,000	1106087	9,106,259,000	1122678	10,645,642,000	1139518	11,868,648,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						4,534,848,000		5,870,897,000		5,912,640,000		7,003,607,000		7,883,653,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Bawang Merah ***	Ton	607897	617015	1,257,625,000	626270	1,697,793,000	635664	1,561,545,000	645199	1,970,969,000	654877	2,160,904,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ****						1,257,625,000		1,697,793,000		1,561,545,000		1,970,969,000		2,160,904,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan bawang merah ****	Ha	N/A	70	1,257,625,000	75	1,697,793,000	80	1,561,545,000	85	1,970,969,000	90	2,160,904,000	Pokja Hortikultura	
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian *****						8,803,375,000		11,884,551,000		10,930,815,000		13,796,783,000		15,126,328,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (bawang merah) *****	Laporan	N/A	4	1,257,625,000	4	1,697,793,000	4	1,561,545,000	4	1,970,969,000	4	2,160,904,000	Pokja Hortikultura	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Cabai ***	Ton	449873	456621	2,780,998,000	463471	3,503,200,000	470423	3,675,763,000	477479	4,215,485,000	484641	4,791,194,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ****						2,780,998,000		3,503,200,000		3,675,763,000		4,215,485,000		4,791,194,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan cabai ****	Ha	N/A	125	2,780,998,000	150	3,503,200,000	175	3,675,763,000	200	4,215,485,000	225	4,791,194,000	Pokja Hortikultura	
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian *****						19,466,986,000		24,522,400,000		25,730,341,000		29,508,395,000		33,538,358,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (cabai) *****	Laporan	N/A	4	2,780,998,000	4	3,503,200,000	4	3,675,763,000	4	4,215,485,000	4	4,791,194,000	Pokja Hortikultura	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat ***	Ton	378793	392201	496,225,000	399086	669,904,000	406094	675,332,000	413227	817,153,000	420488	931,555,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ****						496,225,000		669,904,000		675,332,000		817,153,000		931,555,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tanaman buah ****	Ha	24680	15	218,500,000	20	294,975,000	25	297,364,000	30	379,810,000	35	440,183,000	Pokja Hortikultura	
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian *****						1,529,500,000		2,064,825,000		2,081,548,000		2,658,670,000		3,081,281,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (tanaman buah) *****	Laporan	N/A	4	218,500,000	4	294,975,000	4	297,364,000	4	379,810,000	4	440,183,000	Pokja Hortikultura	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tanaman obat ****	Ha	N/A	5	277,725,000	6	374,929,000	7	377,968,000	8	437,343,000	9	491,372,000	Pokja Hortikultura	
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian *****						1,944,075,000		2,624,503,000		2,645,776,000		3,061,401,000		3,439,604,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (tanaman obat) *****	Laporan	N/A	4	277,725,000	4	374,929,000	4	377,968,000	4	437,343,000	4	491,372,000	Pokja Hortikultura	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						867,405,000		1,548,400,000		1,565,940,000		1,681,823,000		1,751,323,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman hortikultura ***	%	100	100	867,405,000	100	1,548,400,000	100	1,565,940,000	100	1,681,823,000	100	1,751,323,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ****						867,405,000		1,548,400,000		1,565,940,000		1,681,823,000		1,751,323,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah sertifikasi benih hortikultura sayuran ****	Ton	1754	6000	70,000,000	6300	80,000,000	6600	80,000,000	6900	80,000,000	7200	80,000,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih *****						420,000,000		480,000,000		480,000,000		480,000,000		480,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah pengujian mutu sertifikasi benih hortikultura sayuran *****	Sertifikat	N/A	125	70,000,000	129	80,000,000	133	80,000,000	137	80,000,000	145	80,000,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah pengawasan peredaran benih hortikultura ****	Bulan	12	12	422,405,000	12	552,500,000	12	570,040,000	12	640,500,000	12	610,000,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura *****						190,000,000		342,500,000		342,500,000		360,000,000		410,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. (hortik) *****	Laporan	12	12	190,000,000	12	342,500,000	12	342,500,000	12	360,000,000	12	410,000,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan *****						232,405,000		210,000,000		227,540,000		280,500,000		200,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. (perkebunan) *****	Laporan	12	12	232,405,000	12	210,000,000	12	227,540,000	12	280,500,000	12	200,000,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah sertifikasi benih hortikultura buah ****	Batang	1409639	700000	250,000,000	735000	426,915,000	770000	426,915,000	805000	465,823,000	845250	515,823,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih *****						1,500,000,000		2,561,490,000		2,561,490,000		2,794,938,000		3,094,938,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah pemeriksaan sertifikasi bibit hortikultura buah *****	Batang	N/A	700000	250,000,000	735000	426,915,000	770000	426,915,000	805000	465,823,000	845250	515,823,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah sertifikasi benih hortikultura sayuran ****	Ton	1754	6000	125,000,000	6300	488,985,000	6600	488,985,000	6900	495,500,000	7200	545,500,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih *****						750,000,000		2,933,910,000		2,933,910,000		2,973,000,000		3,273,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Luas pemeriksaan sertifikasi bibit hortikultura sayuran *****	Ha	N/A	500	125,000,000	525	488,985,000	550	488,985,000	600	495,500,000	650	545,500,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						850,000,000		1,149,000,000		1,158,306,000		1,401,522,000		1,597,766,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman hortikultura di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang ***	%	100	100	850,000,000	100	1,149,000,000	100	1,158,306,000	100	1,401,522,000	100	1,597,766,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ****						850,000,000		1,149,000,000		1,158,306,000		1,401,522,000		1,597,766,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih sayuran ****	Batang	0.2	0.2	60,000,000	0.2	114,000,000	0.2	115,652,000	0.2	158,838,000	0.2	193,675,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang *****						180,000,000		342,000,000		346,956,000		476,514,000		581,025,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah pengembangan benih sayuran *****	Kg	N/A	200	60,000,000	200	114,000,000	200	115,652,000	200	158,838,000	200	193,675,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk ****	Batang	N/A	6500	600,000,000	6500	845,000,000	6500	852,654,000	6500	1,052,684,000	6500	1,214,091,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang *****						1,800,000,000		2,535,000,000		2,557,962,000		3,158,052,000		3,642,273,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan *****	Batang	N/A	6500	600,000,000	6500	845,000,000	6500	852,654,000	6500	1,052,684,000	6500	1,214,091,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih tanaman buah ****	Batang	2000	10000	190,000,000	11000	190,000,000	12000	190,000,000	13000	190,000,000	14000	190,000,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang *****						570,000,000		570,000,000		570,000,000		570,000,000		570,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak *****	Batang	N/A	10000	190,000,000	10000	190,000,000	10000	190,000,000	10000	190,000,000	10000	190,000,000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN ***						350,000,000		465,000,000		469,373,000		558,690,000		635,906,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura ***	%	12.45	10	300,000,000	8	405,000,000	8	408,280,000	8	494,018,000	8	563,180,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi ****						300,000,000		405,000,000		408,280,000		494,018,000		563,180,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah luas pengendalian serangan OPT komoditas hortikultura ****	Ha	1690	152542	300,000,000	144915	405,000,000	137669	408,280,000	130786	494,018,000	124246	563,180,000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan *****						900,000,000		1,215,000,000		1,224,840,000		1,482,054,000		1,689,540,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan *****	Ha	23.877	19297	300,000,000	17396.34	405,000,000	15713.685	408,280,000	14223.58	494,018,000	12903.245	563,180,000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
			Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura ***	%	1.98	5	50,000,000	5	60,000,000	5	61,093,000	5	64,672,000	5	72,726,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi ****						50,000,000		60,000,000		61,093,000		64,672,000		72,726,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah gerakan penanganan DPI Komoditas Hortikultura ****	Unit	N/A	10	50,000,000	10	60,000,000	10	61,093,000	10	64,672,000	10	72,726,000	Pokja Perlindungan Tanaman Pangan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan *****						150,000,000		180,000,000		183,279,000		194,016,000		218,178,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani *****	Ha	N/A	50	50,000,000	50	60,000,000	50	61,093,000	50	64,672,000	50	72,726,000	Pokja Perlindungan Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
				Produksi Tanaman Perkebunan **	Ton	3860443	4E+06	43,940,981,000	3871909	45,337,843,000	3875790	45,724,876,000	3879661	47,092,723,000	3883535	47,852,534,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						37,233,224,000		38,312,266,000		38,689,729,000		39,812,519,000		40,391,537,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan	
			Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kopi ***	Ton	26758	26875	1,640,000,000	26960	2,214,000,000	27078	2,231,933,000	27183	2,700,638,000	27287	3,078,727,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan	
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ****						1,640,000,000		2,214,000,000		2,231,933,000		2,700,638,000		3,078,727,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan	
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan kopi dan rempah penyegar lainnya ****	Ha	N/A	268	1,640,000,000	260	2,214,000,000	260	2,231,933,000	270	2,700,638,000	280	3,078,727,000	Pokja Tanaman Rempah dan Penyegar	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *****						4,920,000,000		6,642,000,000		6,695,799,000		8,101,914,000		9,236,181,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *****	Dokumen	N/A	4	1,640,000,000	4	2,214,000,000	4	2,231,933,000	4	2,700,638,000	4	3,078,727,000	Pokja Tanaman Rempah dan Penyegar	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
			Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tebu ***	Ton	3666897	4E+06	34,711,673,000	3677911	34,921,673,000	3681590	35,271,673,000	3685273	35,676,673,000	3688959	35,676,673,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan	
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ****						34,711,673,000		34,921,673,000		35,271,673,000		35,676,673,000		35,676,673,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tebu dan tanaman tahunan lainnya ****	Ha	N/A	203	34,711,673,000	250	34,921,673,000	250	35,271,673,000	260	35,676,673,000	260	35,676,673,000	Pokja Semusim	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *****						104,135,019,000		104,765,019,000		105,815,019,000		107,030,019,000		107,030,019,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pereedaran sarana pertanian (tebu dan tanaman semusim lainnya) *****	Dokumen	N/A	4	34,711,673,000	4	34,921,673,000	4	35,271,673,000	4	35,676,673,000	4	35,676,673,000	Pokja Semusim	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
			Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kelapa ***	Ton	166788	166955	881,551,000	167038	1,176,593,000	167122	1,186,123,000	167205	1,435,208,000	167289	1,636,137,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan	
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ****						881,551,000		1,176,593,000		1,186,123,000		1,435,208,000		1,636,137,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan	
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan kelapa dan tanaman semusim lainnya ****	Ha	N/A	100	881,551,000	110	1,176,593,000	110	1,186,123,000	125	1,435,208,000	125	1,636,137,000	Pokja Tanaman Tahunan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian *****						2,644,653,000		3,529,779,000		3,558,369,000		4,305,624,000		4,908,411,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pereedaran sarana pertanian (kelapa dan tanaman tahunan lainnya) *****	Dokumen	N/A	4	881,551,000	4	1,176,593,000	4	1,186,123,000	4	1,435,208,000	4	1,636,137,000	Pokja Tanaman Tahunan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						96,160,000		130,600,000		130,600,000		150,500,000		150,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman perkebunan ***	%	100	100	96,160,000	100	130,600,000	100	130,600,000	100	150,500,000	100	150,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ****						96,160,000		130,600,000		130,600,000		150,500,000		150,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah sertifikasi benih perkebunan ****	Batang	1166733	874180	96,160,000	900405	130,600,000	927145	130,600,000	955235	150,500,000	983890	150,500,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih *****						576,960,000		783,600,000		783,600,000		903,000,000		903,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
			Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah pemeriksaan sertifikasi bibit perkebunan *****	Batang	N/A	874180	96,160,000	900405	130,600,000	927415	130,600,000	955235	150,500,000	983890	150,500,000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						2,209,690,000		2,308,070,000		2,311,080,000		2,389,760,000		2,447,228,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman perkebunan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang ***	%	100	100	2,209,690,000	100	2,308,070,000	100	2,311,080,000	100	2,389,760,000	100	2,447,228,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman ****						2,209,690,000		2,308,070,000		2,311,080,000		2,389,760,000		2,447,228,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih tebu tanaman semusim ****	Mata	N/A	N/A	0	30000	80,000,000	N/A	0	30000	80,000,000	N/A	0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh *****						0		80,000,000		0		80,000,000		0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh *****	Mata	N/A	N/A	0	30000	80,000,000	N/A	0	30000	80,000,000	N/A	0	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih tanaman tahunan ****	Batang	N/A	N/A	2,009,690,000	N/A	1,956,070,000	N/A	2,036,877,000	N/A	1,977,975,000	N/A	2,068,994,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang *****						2,009,690,000		1,956,070,000		2,036,877,000		1,977,975,000		2,068,994,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang *****	Batang	N/A	2500	1,936,410,000	2500	1,856,410,000	2500	1,936,410,000	2500	1,856,410,000	2500	1,936,410,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
			Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah pohon tanaman produksi perkebunan yang dipelihara *****	Pohon	N/A	2.357	73,280,000	2.357	99,660,000	2.357	100,467,000	2.357	121,565,000	2.357	132,584,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar ****	Setek	N/A	20000	200,000,000	20000	272,000,000	20000	274,203,000	20000	331,785,000	20000	378,234,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek *****						200,000,000		272,000,000		274,203,000		331,785,000		378,234,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
			Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek *****	Setek	N/A	20000	200,000,000	20000	272,000,000	20000	274,203,000	20000	331,785,000	20000	378,234,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN ***						4,401,907,000		4,586,907,000		4,593,467,000		4,739,944,000		4,863,269,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Perkebunan ***	%	12.45	10	4,351,907,000	8	4,526,907,000	8	4,532,374,000	8	4,675,272,000	8	4,790,543,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi ****						4,351,907,000		4,526,907,000		4,532,374,000		4,675,272,000		4,790,543,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luas pengendalian serangan OPT komoditas perkebunan ****	Ha	23877	2E+06	4,351,907,000	1739634	4,526,907,000	1713685	4,532,374,000	1422358	4,675,272,000	1903245	4,790,543,000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan *****						13,055,721,000		13,580,721,000		13,597,122,000		14,025,816,000		14,371,629,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan *****	Ha	23.877	19297	4,351,907,000	17396.34	4,526,907,000	15713.685	4,532,374,000	14223.58	4,675,272,000	12903.245	4,790,543,000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
			Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Perkebunan ***	%	1.98	5	50,000,000	5	60,000,000	5	61,093,000	5	64,672,000	5	72,726,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi ****						50,000,000		60,000,000		61,093,000		64,672,000		72,726,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah gerakan penanganan DPI Komoditas Perkebunan ****	Unit	N/A	10	50,000,000	10	60,000,000	10	61,093,000	10	64,672,000	10	72,726,000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan *****						150,000,000		180,000,000		183,279,000		194,016,000		218,178,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
			Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani *****	Ha	N/A	50	50,000,000	50	60,000,000	50	61,093,000	50	64,672,000	50	72,726,000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
				Persentase kenaikan jumlah kelembagaan petani dan peternak yang meningkat kapasitas usahanya **	%	N/A	100	17,794,910,000	100	20,492,110,000	100	20,569,782,000	100	22,799,825,000	100	24,567,392,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN ***						11,706,355,000		13,663,555,000		13,724,703,000		15,322,876,000		16,612,068,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	
			Menguatnya kelembagaan petani	Persentase kelembagaan petani yang terfasilitasi ***	%	N/A	0.2	11,706,355,000	0.2	13,663,555,000	0.2	13,724,703,000	0.2	15,322,876,000	0.2	16,612,068,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian ****						8,366,355,000		9,973,555,000		10,023,769,000		11,336,146,000		12,394,796,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	
			Terwujudnya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	jumlah kelembagaan petani yang terfasilitasi ****	Kelompok	N/A	340	3,417,955,000	340	3,592,955,000	340	3,598,424,000	340	3,741,323,000	340	3,856,594,000	Pokja Kelembagaan	
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani *****						17,089,775,000		17,964,775,000		17,992,120,000		18,706,615,000		19,282,970,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	
			Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan *****	Kelompok	1	4	3,417,955,000	4	3,592,955,000	4	3,598,424,000	4	3,741,323,000	4	3,856,594,000	Pokja Kelembagaan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
			Terwujudnya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	jumlah fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang pertanian ****	Dokumen	1	10	1,293,650,000	10	1,468,650,000	10	1,474,117,000	10	1,617,015,000	10	1,732,287,000	Pokja Kerja Sama	
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani *****						6,468,250,000		7,343,250,000		7,370,585,000		8,085,075,000		8,661,435,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah laporan fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang pertanian *****	Laporan	1	4	1,293,650,000	4	1,468,650,000	4	1,474,117,000	4	1,617,015,000	4	1,732,287,000	Pokja Kerja Sama	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
			Terwujudnya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang terfasilitasi pembiayaan ****	Orang	N/A	403	362,000,000	403	488,700,000	403	492,658,000	403	596,116,000	403	679,572,000	Pokja Pembiayaan	
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani *****						1,810,000,000		2,443,500,000		2,463,290,000		2,980,580,000		3,397,860,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	
			Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi pembiayaan pertanian *****	Laporan	1	4	362,000,000	4	488,700,000	4	492,658,000	4	596,116,000	4	679,572,000	Pokja Pembiayaan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
			Terwujudnya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah luas lahan petani yang terfasilitasi asuransi ****	Ha	N/A	14778	3,292,750,000	14778	4,423,250,000	14778	4,458,570,000	14778	5,381,692,000	14778	6,126,343,000	Pokja Pembiayaan	
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani *****						16,463,750,000		22,116,250,000		22,292,850,000		26,908,460,000		30,631,715,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	
			Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian *****	Laporan	1	4	3,292,750,000	4	4,423,250,000	4	4,458,570,000	4	5,381,692,000	4	6,126,343,000	Pokja Pembiayaan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan ****						3,340,000,000		3,690,000,000		3,700,934,000		3,986,730,000		4,217,272,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	
			Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani	jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menuju korporasi ****	Unit	10	12	3,340,000,000	15	3,690,000,000	15	3,700,934,000	15	3,986,730,000	15	4,217,272,000	Pokja Kelembagaan	
		Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani *****						3,340,000,000		3,690,000,000		3,700,934,000		3,986,730,000		4,217,272,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah pembentukan korporasi petani *****	Unit	5	5	500,000,000	5	675,000,000	5	680,467,000	5	823,365,000	5	938,636,000	Pokja Kelembagaan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
			Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah pendampingan korporasi petani *****	Unit	1	5	2,840,000,000	5	3,015,000,000	5	3,020,467,000	5	3,163,365,000	5	3,278,636,000	Pokja Kelembagaan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN ***						6,088,555,000		6,828,555,000		6,845,079,000		7,476,949,000		7,955,324,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Pertanian	Persentase SDM pertanian yang dilatih ***	%	100	100	6,088,555,000	100	6,828,555,000	100	6,845,079,000	100	7,476,949,000	100	7,955,324,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian ****						6,088,555,000		6,828,555,000		6,845,079,000		7,476,949,000		7,955,324,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM petani yang terfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan pelayanan teknis ****	Orang	2100	1410	5,193,055,000	750	5,733,055,000	990	5,749,579,000	1230	6,181,449,000	1230	6,529,824,000	Pokja Pelatihan	
		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian *****						3,215,000,000		3,522,800,000		3,532,218,000		3,778,384,000		3,976,958,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian *****	Dokumen	N/A	4	3,215,000,000	4	3,522,800,000	4	3,532,218,000	4	3,778,384,000	4	3,976,958,000	Pokja Pelatihan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani *****						3,956,110,000		4,420,510,000		4,434,722,000		4,806,130,000		5,105,732,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan *****	Kelompok	N/A	9	1,978,055,000	14	2,210,255,000	19	2,217,361,000	21	2,403,065,000	23	2,552,866,000	Pokja Pelatihan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Peternakan	Jumlah SDM peternak yang terfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan pelayanan teknis ****	Orang	N/A	690	895,500,000	900	1,095,500,000	1240	1,095,500,000	1940	1,295,500,000	2540	1,425,500,000	Pokja Bimbingan Teknis dan Penyebaran informasi	
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani *****						1,791,000,000		2,191,000,000		2,191,000,000		2,591,000,000		2,851,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
			Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan peternak	jumlah pelatihan Peternakan dan KesehatanHewan Ternak Potong *****	Kali	N/A	11	401,420,000	16	501,420,000	25	501,420,000	46	601,420,000	64	651,420,000	Pokja Bimbingan Teknis dan Penyebaran informasi	Balai Pelatihan Pertanian Kelas A JAWA TENGAH
			Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan peternak	jumlah pelatihan Peternakan dan KesehatanHewan Ternak Perah *****	Kali	N/A	7	276,000,000	8	326,000,000	9	326,000,000	10	376,000,000	11	406,000,000	Pokja Bimbingan Teknis dan Penyebaran informasi	Balai Pelatihan Pertanian Kelas A JAWA TENGAH
			Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan peternak	jumlah pelatihan Peternakan dan KesehatanHewan Ternak Petelur *****	Kali	N/A	5	218,080,000	6	268,080,000	7	268,080,000	8	318,080,000	9	368,080,000	Pokja Bimbingan Teknis dan Penyebaran informasi	Balai Pelatihan Pertanian Kelas A JAWA TENGAH
	Meningkatnya Produksi Peternakan **							47,053,305,000		59,863,685,000		60,438,726,000		69,602,362,000		78,360,817,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
				Produksi Ternak **	Ton	1908389	2E+06	47,053,305,000	1951366	59,863,685,000	1965913	60,438,726,000	1980571	69,602,362,000	1995343	78,360,817,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						14,469,855,000		18,659,961,000		18,841,776,000		21,734,090,000		24,395,134,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Peternakan	
			Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi ternak ***	(ST)/(AU)	5865763	6E+06	14,469,855,000	6297389	18,659,961,000	6392548	18,841,776,000	6493653	21,734,090,000	6586419	24,395,134,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Peternakan	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi ****						390,000,000		1,565,306,000		1,697,121,000		1,442,235,000		3,243,734,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Peternakan	
			Terwujudnya manajemen pemeliharaan peternakan yang baik	Jumlah kelompok atau usaha budidaya ternak yang menerapkan Good Farming Practices ****	Unit	N/A	3	390,000,000	3	1,565,306,000	3	1,697,121,000	3	1,442,235,000	3	3,243,734,000	Pokja Produksi	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan *****						390,000,000		1,565,306,000		1,697,121,000		1,442,235,000		3,243,734,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Peternakan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan *****	Laporan	N/A	4	250,000,000	4	1,425,306,000	4	1,557,121,000	4	1,302,235,000	4	3,103,734,000	Pokja Produksi	Bidang Peternakan KAB/ KOTA JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
			Terlaksananya pelatihan Good Farming Practice	Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan good farming practice *****	Orang	130	40	80,000,000	40	80,000,000	40	80,000,000	40	80,000,000	40	80,000,000	Pokja Produksi	Bidang Peternakan KAB/ KOTA JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
			Terlaksananya Pelatihan/Seminar Budidaya Ternak	Jumlah Generasi Muda/Milenial yang Mengikuti Pelatihan/Seminar Budidaya Ternak *****	Orang	N/A	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	Pokja Produksi	Bidang Peternakan KAB/ KOTA JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi ****						14,079,855,000		17,094,655,000		17,144,655,000		20,291,855,000		21,151,400,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Peternakan	
			Tersedianya Pakan Ternak yang Berkualitas	Jumlah pelaku usaha pakan ternak yang produknya sesuai standar kualitas pakan ****	Unit	N/A	3	2,844,355,000	3	3,847,155,000	3	3,897,155,000	3	4,026,355,000	3	4,685,900,000	Pokja Pakan	
		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi *****						2,844,355,000		3,847,155,000		3,897,155,000		4,026,355,000		4,685,900,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Peternakan	
			Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	N/A	4	100,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	250,000,000	4	500,000,000	Pokja Pakan	Bidang Peternakan Kab/ Kota Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya fasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan	Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak *****	Unit	12	3	2,528,355,000	3	3,381,155,000	3	3,381,155,000	3	3,410,355,000	3	3,819,900,000	Pokja Pakan	Bidang Peternakan Kab/ Kota Jawa Tengah, JAWA TENGAH
			Terlaksananya pengujian pakan/bahan pakan	Jumlah pengujian pakan/bahan pakan *****	sampel	N/A	520	216,000,000	540	266,000,000	560	316,000,000	580	366,000,000	600	366,000,000	Pokja Pakan	Bidang Peternakan Kab/ Kota Jawa Tengah, JAWA TENGAH
			Tersedianya Bibit Ternak Berkualitas	Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan ****	Buah	N/A	3	11,235,500,000	3	13,247,500,000	3	13,247,500,000	3	16,265,500,000	3	16,465,500,000	Pokja Perbibitan	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi *****						11,235,500,000		13,247,500,000		13,247,500,000		16,265,500,000		16,465,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Peternakan	
			Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi *****	Laporan	N/A	4	10,280,500,000	4	12,292,500,000	4	12,292,500,000	4	15,310,500,000	4	15,310,500,000	Pokja Perbibitan	Bidang Peternakan Kab/ Kota Jawa Tengah, JAWA TENGAH
			Terlaksananya pelatihan Good Breeding Practice	Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan good breeding practice *****	Orang	130	40	205,000,000	40	205,000,000	40	205,000,000	40	205,000,000	40	405,000,000	Pokja Perbibitan	Bidang Peternakan Kab/ Kota Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pengawasan bibit ternak	Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan benih/bibit ternak *****	Unit	4	4	750,000,000	4	750,000,000	4	750,000,000	4	750,000,000	4	750,000,000	Pokja Perbibitan	Bidang Peternaka n Kab/ Kota Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						846,382,000		1,562,770,000		1,612,770,000		1,612,770,000		3,113,567,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner	
			Meningkatnya peredaran obat hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase peredaran obat Hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis ***	%	N/A	81	846,382,000	82	1,562,770,000	83	1,612,770,000	84	1,612,770,000	85	3,113,567,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner	
		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor ****						846,382,000		1,562,770,000		1,612,770,000		1,612,770,000		3,113,567,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner	
			terlaksananya pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan	Jumlah laporan pemeriksaan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan ****	Laporan	N/A	4	846,382,000	4	1,562,770,000	4	1,612,770,000	4	1,612,770,000	4	3,113,567,000	Pokja Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan	
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan *****						846,382,000		1,562,770,000		1,612,770,000		1,612,770,000		3,113,567,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner	
			Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar *****	Laporan	N/A	4	684,532,000	4	1,200,920,000	4	1,200,920,000	4	1,200,920,000	4	2,701,717,000	Pokja Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Bidang Veteriner kab/kot a jawa tengah, JAWA TENGAH
			terlaksananya pembinaan keamanan produk hewan	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan keamanan produk hewan *****	Unit	N/A	12	66,565,000	12	166,565,000	12	216,565,000	12	216,565,000	12	216,565,000	Pokja Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Bidang Veteriner kab/kot a jawa tengah, JAWA TENGAH
			terlaksananya pengawasan obat hewan & alsin obat hewan	Jumlah pelaku usaha obat hewan dan alsin obat hewan yang diawasi *****	Unit	N/A	5	95,285,000	5	195,285,000	5	195,285,000	5	195,285,000	5	195,285,000	Pokja Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Bidang Veteriner kab/kot a jawa tengah, JAWA TENGAH
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						5,682,568,000		7,567,340,000		7,567,340,000		8,736,667,000		10,147,913,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya Produksi dan Distribusi Semen Beku	Persentase produksi dan distribusi semen beku ***	%	0.53	1	5,682,568,000	1	7,567,340,000	1	7,567,340,000	1	8,736,667,000	1	10,147,913,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi ****						5,682,568,000		7,567,340,000		7,567,340,000		8,736,667,000		10,147,913,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			tesedianya semen beku yang layak diproduksi	Presentase semen beku layak edar ****	%	99.32	80	1,900,235,000	80	2,688,243,000	80	2,688,243,000	80	3,108,603,000	80	3,830,768,000	Pokja Produksi dan Distribusi	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi *****						1,900,235,000		2,688,243,000		2,688,243,000		3,108,603,000		3,830,768,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi *****	Laporan	N/A	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	Pokja Produksi dan Distribusi	Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A kab/ kota jawa tengah, JAWA TENGAH
			Tersedianya semen beku yang dihasilkan	Jumlah produksi semen beku *****	Dosis	298817	390000	1,850,235,000	391000	2,638,243,000	392000	2,638,243,000	393000	3,058,603,000	394000	3,780,768,000	Pokja Produksi dan Distribusi	Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A kab/ kota jawa tengah, JAWA TENGAH
			Tersedianya semen segar	Jumlah produksi semen segar ****	Liter	16.54	18	3,782,333,000	18	4,879,097,000	18	4,879,097,000	18	5,628,064,000	18	6,317,145,000	Pokja Pemeliharaan Ternak	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi *****						3,782,333,000		4,879,097,000		4,879,097,000		5,628,064,000		6,317,145,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	N/A	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	Pokja Pemeliharaan Ternak	Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A kab/ kota jawa tengah, JAWA TENGAH
			Tersedianya ternak pejantan yang layak diproses semen segarnya	Jumlah ternak pejantan yang layak diproses semen segarnya *****	Ekor	N/A	20	3,732,333,000	20	4,829,097,000	20	4,829,097,000	20	5,578,064,000	20	6,267,145,000	Pokja Pemeliharaan Ternak	Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A kab/ kota jawa tengah, JAWA TENGAH
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN ***						8,704,088,000		10,110,000,000		10,264,178,000		11,750,000,000		13,050,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging ***	%	N/A	1	6,266,640,000	1	7,279,200,000	1	7,390,215,000	1	8,460,000,000	1	9,396,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi ****						6,266,640,000		7,279,200,000		7,390,215,000		8,460,000,000		9,396,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya bibit ternak ruminansia pedaging yang ber sklb	Jumlah bibit ternak ruminansia pedaging yang ber sklb ****	Ekor	N/A	62	3,220,210,000	63	3,740,700,000	64	3,797,752,000	65	4,347,500,000	66	4,828,500,000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi *****						12,880,840,000		14,962,800,000		15,191,008,000		17,390,000,000		19,314,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi *****	Laporan	N/A	4	696,000,000	4	808,800,000	4	821,140,000	4	940,000,000	4	1,044,000,000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A kab/ kota jawa tengah, JAWA TENGAH
			tersedianya ternak ruminansia potong	Jumlah produksi ternak ruminansia potong *****	Ekor	N/A	144	2,524,210,000	145	2,931,900,000	146	2,976,612,000	147	3,407,500,000	148	3,784,500,000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A kab/ kota jawa tengah, JAWA TENGAH
			meningkatnya produksi ternak non ruminansia pedaging yang diedarkan	Jumlah produksi ternak non ruminansia pedaging yang diedarkan ****	Ekor	N/A	14433	3,046,430,000	14577	3,538,500,000	14723	3,592,463,000	14811	4,112,500,000	15019	4,567,500,000	Pokja Pembibitan Ternak Nonruminansia	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi *****						12,185,720,000		14,154,000,000		14,369,852,000		16,450,000,000		18,270,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			tersedianya ternak nonruminansia penghasil daging	Jumlah produksi ternak nonruminansia pedaging *****	Ekor	N/A	20618	3,046,430,000	20824	3,538,500,000	21033	3,592,463,000	21159	4,112,500,000	21455	4,567,500,000	Pokja Pembibitan Ternak Nonruminansia	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A kab/ kota jawa tengah, JAWA TENGAH
			Meningkatnya produksi ternak ruminansia penghasil susu	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia penghasil susu ***	%	N/A	1	783,518,000	1	909,900,000	1	923,769,000	1	1,057,500,000	1	1,174,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi ****						783,518,000		909,900,000		923,769,000		1,057,500,000		1,174,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			meningkatnya bibit ternak ruminansia perah yang ber sklb	Jumlah bibit ternak ruminansia perah yang ber sklb ****	Ekor	N/A	4	783,518,000	5	909,900,000	6	923,769,000	7	1,057,500,000	8	1,174,500,000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi *****						3,134,072,000		3,639,600,000		3,695,076,000		4,230,000,000		4,698,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			tersedianya ternak ruminansia perah	Jumlah produksi ternak ruminansia perah *****	Ekor	N/A	11	783,518,000	12	909,900,000	13	923,769,000	14	1,057,500,000	15	1,174,500,000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A kab/ kota jawa tengah, JAWA TENGAH
			Meningkatnya produksi ternak non ruminansia penghasil telur	Persentase peningkatan produksi ternak non ruminansia penghasil telur ***	%	N/A	1	1,653,930,000	1	1,920,900,000	1	1,950,194,000	1	2,232,500,000	1	2,479,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi ****						1,653,930,000		1,920,900,000		1,950,194,000		2,232,500,000		2,479,500,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			meningkatnya produksi ternak non ruminansia petelur yang diedarkan	Jumlah produksi ternak non ruminansia petelur yang diedarkan ****	Ekor	N/A	16399	1,653,930,000	16562	1,920,900,000	16728	1,950,194,000	16895	2,232,500,000	17064	2,479,500,000	Pokja Pembibitan Ternak Nonruminansia	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi *****						6,615,720,000		7,683,600,000		7,800,776,000		8,930,000,000		9,918,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
			tersedianya ternak nonruminansia penghasil telur	Jumlah produksi ternak nonruminansia petelur *****	Ekor	N/A	27331	1,653,930,000	27604	1,920,900,000	27880	1,950,194,000	28159	2,232,500,000	28440	2,479,500,000	Pokja Pembibitan Ternak Nonruminansia	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A kab/ kota jawa tengah, JAWA TENGAH
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN ***						5,034,000,000		6,970,000,000		6,990,000,000		8,100,000,000		9,200,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana	
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana peternakan ***	%	5	5	5,034,000,000	5	6,970,000,000	5	6,990,000,000	5	8,100,000,000	5	9,200,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana	
		Penataan Prasarana Pertanian ****						5,034,000,000		6,970,000,000		6,990,000,000		8,100,000,000		9,200,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana	
			Terselanggaranya Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah fasilitasi sarpras peternakan ****	Unit	N/A	10	5,034,000,000	13	6,970,000,000	15	6,990,000,000	19	8,100,000,000	21	9,200,000,000	Seksi Prasarana	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya *****						20,136,000,000		27,880,000,000		27,960,000,000		32,400,000,000		36,800,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Lahan dan prasarana peternakan)	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya (Lahan dan prasarana peternakan) *****	Dokumen	N/A	4	5,034,000,000	4	6,970,000,000	4	6,990,000,000	4	8,100,000,000	4	9,200,000,000	Seksi Prasarana	Bidang Prasarana dan Sarana JAWA TENGAH
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER ***						7,314,440,000		8,961,220,000		9,013,761,000		10,644,990,000		10,644,990,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner	
			Menurunnya jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	Persentase penurunan jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS ***	%	N/A	1	5,734,415,000	2	6,981,195,000	3	7,033,736,000	3	8,033,736,000	3	8,033,736,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner	
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****						5,029,075,000		6,195,855,000		6,248,396,000		6,248,396,000		6,248,396,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner	
			Terlaksananya pengawasan kesehatan hewan yang optimal	Jumlah laporan Situasi Penyakit Menular Strategis (PHMS) ****	Laporan	4	4	5,029,075,000	4	6,195,855,000	4	6,248,396,000	4	6,248,396,000	4	6,248,396,000	Pokja Kesehatan Hewan	
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****						5,029,075,000		6,195,855,000		6,248,396,000		6,248,396,000		6,248,396,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner	
			Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****	Laporan	N/A	4	4,287,005,000	4	5,453,785,000	4	5,453,785,000	4	5,453,785,000	4	5,453,785,000	Pokja Kesehatan Hewan	Bidang Veteriner kab/kota jawa tengah, JAWA TENGAH
			Terlaksananya Penyidikan dan Pengamatan Kesehatan Hewan (surveilans) yang optimal	Jumlah Ternak/hewan Tersurveilans PHMS *****	Ekor	2022	2000	742,070,000	2000	742,070,000	2000	794,611,000	2000	794,611,000	2000	794,611,000	Pokja Kesehatan Hewan	Bidang Veteriner kab/kota jawa tengah, JAWA TENGAH

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi ****						705,340,000		785,340,000		785,340,000		1,785,340,000		1,785,340,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner	
			Terlaksananya pengawasan ternak di pos lalu lintas yang optimal	Jumlah Ternak yang diperiksa di pos lalu lintas ternak ****	Ekor	N/A	3E+06	705,340,000	2940000	785,340,000	2960000	785,340,000	2980000	1,785,340,000	3000000	1,785,340,000	Pokja Kesehatan Hewan	
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) *****						705,340,000		785,340,000		785,340,000		1,785,340,000		1,785,340,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner	
			Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM *****	Laporan	N/A	4	705,340,000	4	785,340,000	4	785,340,000	4	1,785,340,000	4	1,785,340,000	Pokja Kesehatan Hewan	Bidang Veteriner kab/kota jawa tengah, JAWA TENGAH
			Meningkatnya Unit Usaha Yang Bersertifikat NKV	Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV ***	%	N/A	30	1,580,025,000	30.8	1,980,025,000	32.8	1,980,025,000	33.3	2,611,254,000	33.5	2,611,254,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner	
		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan ****						1,580,025,000		1,980,025,000		1,980,025,000		2,611,254,000		2,611,254,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner	
			terfasilitasinya sertifikat NKV pada pelaku usaha	Jumlah unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV ****	Unit	N/A	45	1,580,025,000	47	1,980,025,000	50	1,980,025,000	52	2,611,254,000	55	2,611,254,000	Pokja Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan *****						1,580,025,000		1,980,025,000		1,980,025,000		2,611,254,000		2,611,254,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner	
			Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner *****	Laporan	N/A	4	915,000,000	4	1,115,000,000	4	1,115,000,000	4	1,115,000,000	4	1,115,000,000	Pokja Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			terlaksananya pembinaan higiene sanitasi	jumlah sasaran yang terfasilitasi pembinaan higiene sanitasi *****	Unit	N/A	15	665,025,000	17	865,025,000	20	865,025,000	22	1,496,254,000	25	1,496,254,000	Pokja Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER ***						2,852,922,000		3,680,000,000		3,715,000,000		4,285,160,000		4,814,860,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Layanan Veteriner ***	%	N/A	100	2,852,922,000	100	3,680,000,000	100	3,715,000,000	100	4,285,160,000	100	4,814,860,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan ****						2,852,922,000		3,680,000,000		3,715,000,000		4,285,160,000		4,814,860,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			terlaksanakan pengujian di laboratorium veteriner	Jumlah Pengujian di Laboratorium Veteriner di Jawa Tengah ****	sampel	N/A	44930	2,139,691,000	45660	2,760,000,000	46390	2,786,250,000	47180	3,213,870,000	47650	3,611,145,000	Pokja Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner *****						4,279,382,000		5,520,000,000		5,572,500,000		6,427,740,000		7,222,290,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
			Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner *****	Dokumen	N/A	4	2,139,691,000	4	2,760,000,000	4	2,786,250,000	4	3,213,870,000	4	3,611,145,000	Pokja Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A kab/ kota jawa tengah, JAWA TENGAH
			terlaksananya pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan	Jumlah hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Jawa Tengah ****	Ekor	N/A	24950	713,231,000	25150	920,000,000	25350	928,750,000	25550	1,071,290,000	25750	1,203,715,000	Pokja Pelayanan Kesehatan Hewan	
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner *****						1,426,462,000		1,840,000,000		1,857,500,000		2,142,580,000		2,407,430,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			terlaksananya pemeriksaan dan pengobatan hewan	Jumlah laporan pemeriksaan dan pengobatan hewan *****	Laporan	N/A	4	713,231,000	4	920,000,000	4	928,750,000	4	1,071,290,000	4	1,203,715,000	Pokja Pelayanan Kesehatan Hewan	Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A kab/ kota jawa tengah, JAWA TENGAH
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN ***						2,149,050,000		2,352,394,000		2,433,901,000		2,738,685,000		2,994,353,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	
			Menguatnya Kelembagaan Peternak	Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan peternak ***	%	N/A	1.25	2,149,050,000	1.3	2,352,394,000	1.37	2,433,901,000	1.56	2,738,685,000	2	2,994,353,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian ****						1,104,600,000		1,104,600,000		1,104,600,000		1,104,600,000		1,104,600,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	
			Terwujudnya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah peternak yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan ****	Orang	N/A	30	1,104,600,000	30	1,104,600,000	30	1,104,600,000	30	1,104,600,000	30	1,104,600,000	Pokja Pembiayaan	
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani *****						5,523,000,000		5,523,000,000		5,523,000,000		5,523,000,000		5,523,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	
			Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	jumlah laporan fasilitasi asuransi dan pembiayaan peternakan *****	Laporan	N/A	4	1,104,600,000	4	1,104,600,000	4	1,104,600,000	4	1,104,600,000	4	1,104,600,000	Pokja Pembiayaan	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan ****						1,044,450,000		1,247,794,000		1,329,301,000		1,634,085,000		1,889,753,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	
			Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok peternak menuju korporasi ****	Kelompok	N/A	2	1,044,450,000	2	1,247,794,000	4	1,329,301,000	4	1,634,085,000	4	1,889,753,000	Pokja Kelembagaan	
		Pendampingan dan pengawalan korporasi petani *****						1,044,450,000		1,247,794,000		1,329,301,000		1,634,085,000		1,889,753,000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan	

Tabel Bab 4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan - Semua Bidang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi *****	Unit	N/A	14	764,450,000	16	764,450,000	20	764,450,000	24	764,450,000	24	764,450,000	Pokja Kelembagaan	Bidang Kelembagaan JAWA TENGAH
			Terlaksananya pelatihan manajemen usaha pada korporasi/kelompok peternak	Jumlah korporasi/kelompok ternak yang mendapat pelatihan manajemen usaha peternakan *****	Kelompok	N/A	2	30,000,000	2	60,000,000	2	90,000,000	2	90,000,000	2	120,000,000	Pokja Kelembagaan	Bidang Kelembagaan JAWA TENGAH
			terlaksananya fasilitasi sarpras penguatan kelembagaan	jumlah fasilitasi sarpras penguatan kelembagaan *****	Unit	N/A	2	100,000,000	3	250,000,000	3	300,000,000	4	600,000,000	5	800,000,000	Pokja Kelembagaan	Bidang Kelembagaan JAWA TENGAH
			Terlaksananya fasilitasi promosi dan akses pasar kelompok usaha produk ternak	Jumlah pelaku usaha produk ternak yang terfasilitasi promosi & akses pasar *****	Unit	N/A	5	150,000,000	5	173,344,000	6	174,851,000	6	179,635,000	6	205,303,000	Pokja Kelembagaan	Bidang Kelembagaan JAWA TENGAH

Tabel 4.2.

Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output / Target/ Volume (kondisi akhir 2030)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah priotitas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)	Bantuan rehabilitasi RJIT, Irigasi Perpompaan, Perpipaan, dan Sumur Dangkal	60 Paket	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian/ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan	Bantuan Sayuran Polybag untuk KWT	195 Paket	Program Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian/ Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian/Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	Penghapusan hutang Petani,nelayan, UMKM	Penghapusan Hutang Petani Perkebunan Inti Rakyat	4037 Sertifikat	Program Penyuluhan Pertanian/ Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Bidang Kelembagaan	

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output / Target/ Volume (kondisi akhir 2030)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
4	Penyediaan benih yang berkualitas	Bantuan Benih padi, jagung dan kedelai	105.600 Ha Benih Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian/ Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
5	Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian	Bantuan Alsintan	1226 Unit	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian/ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
6	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi Dalam Pengolahan Pertanian	Integrated Farming		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian/ Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
7	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan	Pelatihan usaha pertanian/ peternakan	180 orang	Program Penyuluhan Pertanian/ Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan	Balai Pelatihan Perta	

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output / Target/ Volume (kondisi akhir 2030)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
	Pesantren	bagi pesantren		Pertanian/ Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	nian	
8	Petani milenial gajian	Pemberian stimulan sarana dan prasarana, pelatihan, dan pendampingan	44 angkatan	Program Penyuluhan Pertanian/ Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/ Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Balai Pelatihan Pertanian	
9	Pupuk Mudah Bagi Petani	Sosialisasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Pendataan Petani calon penerima pupuk bersubsidi, Penyusunan SK Alokasi Pupuk Bersubsidi Tk. Provinsi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, koordinasi ke Pusat dan BUMN	35 kab/kota	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian/ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output / Target/ Volume (kondisi akhir 2030)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
10	Pengembangan Pertanian yang terintegrasi	Kelembagaan ekonomi petani melalui korporasi (integrasi pertanian hulu-hilir)	50 unit	Program Penyuluhan Pertanian/Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan/ sub kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Bidang Kelembagaan	
11	Asuransi Gagal Panen Petani	Pembiayaan premi asuransi gagal panen	7.3890 ha	Program Penyuluhan Pertanian/ kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani/Sub Kegiatan Pelaksanaan	Bidang Kelembagaan	
12	Identifikasi dan Pemetaan Potensi Bibit Ternak Khas Jawa	Kontes Ternak	4 laporan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi/ Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi.	Bidang Peternakan	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan
13	Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Lokal	Penerapan Good Farming Practice (GFP)	4 laporan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,	Bidang Peternakan	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output / Target/ Volume (kondisi akhir 2030)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
				Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi/ Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan		peternakan
14	Pelatihan dan Pendampingan Peternak lokal	Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak	7.310 orang	Program Penyuluhan Pertanian/ Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/ Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Balai Penyuluhan Pertanian	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan
15	Penjaminan Kualitas Pakan Ternak	Penyediaan Pakan Ternak Berkualitas (Gerakan Pengembangan Pakan Berkualitas)	46,5 Ha	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi/ Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Bidang Peternakan	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan
16	Penyediaan bibit ternak berkualitas	penambahan indukan sapi perah berkualitas	1.000 ekor	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi/ 1. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi	Bidang Peternakan	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output / Target/ Volume (kondisi akhir 2030)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
				Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi. 2. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
17	Penyediaan benih ternak berkualitas	Produksi dan distribusi semen beku	1.960.000 dosis	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi/ Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi.	Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan
18	Penyediaan bibit ternak berkualitas	Produksi ternak ruminansia potong	730 ekor	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi/ Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output / Target/ Volume (kondisi akhir 2030)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
				Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi.		
19		Produksi ternak non ruminansia potong	105.089 ekor	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi/ Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi.	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan
20		Produksi ternak ruminansia perah	65 ekor	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi/ Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi.	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan
21		Produksi ternak non ruminansia petelur	139.414 ekor	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan	Balai Pembibitan Ternak Jawa	Dinas Kabupaten/kota yang membida

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output / Target/ Volume (kondisi akhir 2030)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
				Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi/ Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi.	Tengah	ngi fungsi peternakan
22	Penerapan teknologi perbibitan Ternak	Penjaringan bibit hasil TE (transfer embrio)	10 ekor	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi/ Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi.	Bidang Peternakan	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan
23	Penerapan teknologi perbibitan Ternak	Pengembangan Wilayah Sumber Bibit (wilsumbit)	5 laporan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi/ Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan	Bidang Peternakan	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output / Target/ Volume (kondisi akhir 2030)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
				Kewenangan Provinsi.		
24	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian dan Penanggulangan PHMSZ	Vaksinasi 500.000 ekor, pengobatan PHMS 50.000 ekor, surveilans 10.000 ekor per tahun	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner/Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Bidang Veteriner	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan
25	Meningkatkan Jaminan keamanan dan mutu produk asal hewan	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	47 unit per tahun	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner/Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan/Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Bidang Veteriner	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan
26	Meningkatkan Jaminan halal dan keamanan pangan	Uji Kompetensi Juleha (juru sembelih halal)	500 orang	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner/Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Bidang Veteriner	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output / Target/ Volume (kondisi akhir 2030)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
	asal hewan			Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan/Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit		peternakan, Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian
27	Meningkatkan Jaminan halal dan keamanan pangan RPH di Jawa Tengah	RESTRUKTURISASI Rumah Potong Hewan (RPH)	35 RPH	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner/Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan/Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Bidang Veteriner	Dinas Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, utamanya dalam sektor pertanian dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra:

Tabel 4.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian		Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor pertanian	Angka	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,09
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Tanaman Pangan	Ton	12.628.175	12.734.625	12.842.028	12.950.425	13.059.794	13.170.147	64.757.019
		Produksi Tanaman Hortikultra	Ton	1.063.058	1.073.636	1.089.741	1.106.087	1.122.678	1.139.518	5.531.660
		Produksi Tanaman Perkebuna	Ton	3.864.222	3.868.066	3.871.909	3.875.790	3.879.661	3.883.535	19.378.961

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Persentase kelembagaan petani dan peternak yang difasilitasi peningkatan kapasitas usahanya	%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Ternak	Ton	1.922.605	1.936.930	1.951.366	1.965.913	1.980.571	1.995.343	1.995.343
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pertanian dan Peternakan		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Angka	74	74,5	75	75,5	76	77	77
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Angka	2,85	2,9	2,95	3	3,05	3,15	3,15

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Angka	81	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Peningkatan produksi tanaman pangan	16,09%	-18,70%	3,09%	0,84%%	0,84%	0,87%	0,86%	0,84%	0,84%
2.	Peningkatan Produksi Hortikultura	-2,06%	9,58%	0,49%	1,57%	1,57%	1,15%	1,49%	1,49%	1,49%
3.	Peningkatan Produksi Perkebunan	-2.59%	40,94%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%
4.	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	6,46%	2,77%	0,74%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yang memuat diantaranya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pertanian dan peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
2. Program dan Kegiatan merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan implementasi sesuai tupoksi yaitu : (1) Perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta kelembagaan; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta kelembagaan; (3) Pembinaan dan fasilitasi bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta kelembagaan lingkup provinsi dan kabupaten/kota; (4) Pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta kelembagaan; (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta kelembagaan; (6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Program yang direncanakan untuk perubahan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, meliputi : (1) Program Pengembangan dan penyediaan Sarana Pertanian; (2) Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana Pertanian; (3) Program Penyuluhan; (4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; (5) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner; (6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang diampu oleh Sekretariat, Bidang dan Balai yang ada di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

B. **Penutup**

1. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai arah dan pedoman seluruh Unit Kerja di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Dokumen Renstra ini secara normatif memuat program dan rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi pelaksanaan dokumen Renstra, maka diperlukan monitoring dan evaluasi oleh masing-msing Unit Kerja di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terkait dengan pentingnya pengawasan internal dan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yang memuat diantaranya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pertanian dan peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
2. Program dan Kegiatan merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan implementasi sesuai tupoksi yaitu : (1) Perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta kelembagaan; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta kelembagaan; (3) Pembinaan dan fasilitasi bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta kelembagaan lingkup provinsi dan kabupaten/kota; (4) Pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta kelembagaan; (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta kelembagaan; (6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Program yang direncanakan untuk perubahan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, meliputi : (1) Program Pengembangan dan penyediaan Sarana Pertanian; (2) Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana Pertanian; (3) Program

Penyuluhan; (4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; (5) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; (6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang diampu oleh Sekretariat, Bidang dan Balai yang ada di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

B. **Penutup**

1. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai arah dan pedoman seluruh Unit Kerja di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Dokumen Renstra ini secara normatif memuat program dan rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi pelaksanaan dokumen Renstra, maka diperlukan monitoring dan evaluasi oleh masing-msing Unit Kerja di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terkait dengan pentingnya pengawasan internal dan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.

POHON KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH

Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Sektor PDRB Pertanian

Meningkatnya produksi pertanian dan peternakan

Meningkatnya Indeks Pertanaman

Meningkatnya pemanfaatan terhadap sarana dan prasarana

Meningkatnya alsara yatani terhadap sarana prasarana pascapanen lainnya

Meningkatnya pengelolaan lahan pertanian dan hortikultura yang sesuai dengan kondisi dan fungsi lahan pertanian

Meningkatnya jumlah jaringan irigasi tersier kondisi baik

Meningkatnya luasan lahan pertanian yang dilindungi dan dilestarikan

Meningkatnya Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air pertanian

Meningkatnya jumlah jaringan irigasi tersier kondisi baik

Meningkatnya sumber daya air pertanian dikonservasi

Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Peternakan

Meningkatnya kualitas lahan pertanian

Meningkatnya penanaman

Meningkatnya optimasi lahan pertanian

Meningkatnya penerapan GAP dan OHP

Meningkatnya pemanfaatan alsintan pra dan pasca panen

Meningkatnya penggunaan benih sertifikasi unggul

Meningkatnya keterediaan benih unggul

Meningkatnya pemanfaatan balai benih sebagai penyedia benih unggul bersertifikat

Meningkatnya jumlah penangkar penyedia benih unggul

Meningkatnya pengamanan produksi dari potensi gagal panen

Menurunnya jumlah Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Menurunnya nedto ancaman dampak perubahan iklim

Meningkatnya populasi ternak

Tersedianya produksi benih ternak berkualitas

Optimalnya tata kelola disribusi benih ternak

Tersedianya bibit ternak berkualitas

Tersedianya pakan berkualitas

Terjaminnya mutu dan keamanan pakan

Optimalnya manajemen usaha peternakan

Tersedianya sarana dan prasarana peternakan

Meningkatnya status kesehatan hewan

Menurunnya ancaman penyakit hewan

Optimalnya penggawasan kesehatan hewan

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan hewan

Optimalnya penjaminan produk hewan (pangan dan non pangan)

Meningkatnya penerapan higiene sanitasi pada usaha produk hewan (RPH)

Meningkatnya kesadaran publik usaha untuk sertifikasi produk

Meningkatnya penggunaan kosmesan produk hewan

Meningkatnya Kelembagaan dan Kapasitas SDM Pertanian dan Peternakan

Meningkatnya jumlah SDM pelaku usaha pertanian dan peternakan

Meningkatnya minat generasi muda menjadi pelaku usaha pertanian dan peternakan

Semakin stabilnya harga komoditas pertanian dan peternakan

Meningkatnya kualitas pelaku usaha pertanian dan peternakan

Meningkatnya alsara yatani dan yaternak terhadap informasi usaha pertanian dan peternakan

Meningkatnya kompetensi yatani yaternak untuk budidaya dan usaha pertanian dan peternakan melalui pelatihan ar pendampingan

Meningkatnya kelembagaan ekonomi pertanian dan peternakan

Meningkatnya alsara yatani untuk pembiayaan budidaya pertanian yaternakan

Meningkatnya alsara yatani terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit usaha dari lembaga keuangan formal lainnya

Meningkatnya minat pertanian dalam pembiayaan kredit pertanian karena tingginya nedto gagal panen

Suku bunga pertanian usaha pertanian tidak mendukung untuk usaharnya

SASARAN DAERAH	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan IK : Pertumbuhan Ekonomi
TUJUAN OPD	Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian IK: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Pertanian
DEFINISI OPERASIONAL	Pertumbuhan produksi barang dan jasa sektor pertanian di wilayah perekonomian Jawa tengah dalam selang waktu 1 tahun (data sesuai rilis BPS)
SASARAN OPD	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan Produksi Tanaman Pangan Produksi Tanaman Hortikultura Produksi Tanaman Perkebunan
FORMULASI	Jumlah Produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (bawang merah, cabai, durian, alpukat, jahe, kencur, melati), perkebunan (kelapa, tebu, kopi) Tahun berkenaan

NOMENKLATUR PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN SARANA PERTANIAN		
STRUKTUR	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		
INDIKATOR PROGRAM	Ik 1 : Jumlah produksi Padi Ik 2 : Jumlah produksi jagung Ik 3 : Jumlah Produksi kedelai		Ik 1 : jumlah produksi bawang merah Ik 2 : jumlah produksi cabai Ik 3 : jumlah produksi tanaman buah Ik 4 : jumlah produksi tanaman obat
formulasi	Ik 1 : Jumlah Produks padi, jagung , kedelai tahun berjalan		Ik 1 : jumlah produksi bawang merah Ik 2 : jumlah produksi cabai Ik 3 : jumlah produksi tanaman buah Ik 4 : jumlah produksi tanaman obat
kegiatan (sesuai nomenklatur)	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
STRUKTUR	Pokja Padi	Pokja Palawija	Pokja Hortikultura
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya padi	Ik 1 : Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya jagung dan serealia lainnya Ik 2 : Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya kedelai, aneka kacang dan umbi	Ik 1 : Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan pengembangan bawang merah Ik 2 Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan cabai IK 3 : Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tanaman buah Ik 4 : Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tanaman obat
FORMULASI	Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budiadya padi tahun berjalan	ik 1 : jumlah luas tanam bantuan budidaya jagung dan serealia lainnya tahun berjalan Ik 2 : jumlah luas tanam produksi kedelai budidaya kedelai, aneka kacang dan umbi tahun berjalan	Ik 1 : jumlah produksi bawang merah tahun berjalan Ik 2 : jumlah produksi cabai (rawit, keriting, teropong) tahun berjalan ik 3 : jumlah produksi tanaman buah (durian dan alpukat) tahun berjalan ik 4 : jumlah produksi tanaman obat (jahe, kencur, melati) tahun berjalan
SUB KEGIATAN	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Ik 1 : Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Ik 1 : Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Ik 1 : Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
FORMULASI	Ik 1 : Jumlah Laporan koordinasi, pelaksanaan dan monev pengembangan padi tahun berjalan	Ik 1 : Jumlah Laporan koordinasi, pelaksanaan dan monev pengembangan jagung dan kedelai tahun berjalan	Ik 1 : Jumlah Laporan koordinasi, pelaksanaan dan monev pengembangan bawang merah, cabai, tanaman buah dan tanaman obat tahun berjalan
SSK	SSK : padi	SSK 1 : jagung SSK 2 : kedelai SSK 3 : aneka serealia SSK 4 : kacang-kacangan dan/atau umbi	SSK 1 : cabai SSK 2 : bawang merah SSK 3 : tanaman buah SSK 4 : tanaman obat dan hias
FORMULASI			

NOMENKLATUR PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN SARANA PERTANIAN		
STRUKTUR	Bidang Perkebunan		
INDIKATOR PROGRAM	IK 1 : Jumlah Produksi Kopi Ik 2 : Jumlah Produksi Kelapa Ik 3 : Jumlah Produksi Tebu		
formulasi	Jumlah Produksi kopi, tebu dan kelapa tahun berjalan		
kegiatan (sesuai nomenklatur)	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
STRUKTUR	Pokja Tanaman Tahunan	Pokja Tanaman Semusim	Pokja Tanaman Rempah dan Penyegar
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Produksi Kelapa dan Tanaman Tahunan Lainnya	Jumlah Produksi Tebu dan Tanaman Semusim Lainnya	Jumlah Produksi Kopi dan Tanaman Rempah Penyegar Lainnya
FORMULASI	Jumlah Produksi Kelapa dan Tanaman Tahunan Lainnya tahun berjalan	Jumlah Produksi Tebu dan Tanaman Semusim Lainnya tahun berjalan	Jumlah Produksi Kopi dan Tanaman Rempah Penyegar tahun berjalan
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian		
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Ik 1 : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	Ik 1 : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	Ik 1 : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian
FORMULASI	IK 1 : Dokumen Laporan koordinasi dan pengawasan bantuan benih dan saprodi pertanian (Kelapa dan Tanaman Tahunan Lainnya)	IK 1 : Dokumen Laporan koordinasi dan pengawasan bantuan benih dan saprodi pertanian (Tebu dan Tanaman Semusim Lainnya)	IK 1 : Dokumen Laporan koordinasi dan pengawasan bantuan benih dan saprodi pertanian (Kopi dan Tanaman Rempah Penyegar Lainnya)
SSK	SSK 1 : kelapa SSK 2 : tanaman tahunan lainnya (jambu mete, karet, kakao dan aren)	SSK 1 : Tebu SSK 2 : tanaman semusim lainnya (lada, pala, cengkeh, teh dan tembakau)	SSK 1 : Kopi SSK 2 : tanaman rempah penyegar lainnya (vanilli, nilam, sereh wangi)
FORMULASI			

NOMENKLATUR PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
STRUKTUR	Bidang Prasarana dan Sarana		
INDIKATOR PROGRAM	IK 1 : Persentase sasaran yang terfasilitasi sarpras pertanian		
formulasi	IK 1 : Jumlah sasaran tahun berjalan dikurangi Jumlah sasaran tahun sebelumnya) dibagi Jumlah sasaran terfasilitasi tahun sebelumnya) dikali 100%, (pupuk, pembenah tanah, alsintan, biogas, APPO)		
kegiatan (sesuai nomenklatur)	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian		
STRUKTUR	Seksi Sarana	Seksi Alsin	Seksi Prasarana
INDIKATOR KEGIATAN	Ik 1 : Jumlah fasilitasi pupuk non subsidi/pembenah tanah Ik 2 : Jumlah luas lahan yang dioptimasi IK 4 : Sarpras Peternakan	Ik 1 : jumlah kelembagaan pengelola alsintan Ik 2 : Sarpras Peternakan	Ik 1 : jumlah jaringan irigasi tersier yang difasilitasi Ik 2: jumlah jaringan irigasi yang difasilitasi (tersier dan alternatif) Ik 2 : Prasarana Peternakan
FORMULASI	Ik 1 : Jumlah stimulan bantuan pupuk non subsidi dan/atau pembenah tanah pada tahun berjalan Ik 2 : Luasan optimasi lahan tahun berjalan	Ik 1 : Jumlah kelembagaan pengelola bantuan alsintan tahun berjalan	Ik 1 : Jumlah rehab jaringan irigasi tahun berjalan
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		
INDIKATOR SUB KEGIATAN	IK 1 : Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya IK 2 : JJumlah Koordinasi, sinkronissi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya (Lahan dan prasarana peternakan)	IK 1 : Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya (alsintan) IK	IK 1 : Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya (irigasi tersier) IK 2 : Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya (irigasi alternatif)
FORMULASI	IK 1 : Jumlah Koordinasi, sinkronissi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya tahun berjalan (Pupuk dan Optimasi Lahan)	IK 1 : Jumlah Koordinasi, sinkronissi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya tahun berjalan (Alsintan)	IK 1 : Jumlah Koordinasi, sinkronissi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya tahun berjalan (Irigasi)
SSK			
FORMULASI			

NOMENKLATUR PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
STRUKTUR	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A			
INDIKATOR PROGRAM	IK : Persentase layanan Sertifikasi benih			
formulasi	Jumlah layanan sertifikasi benih tahun berjalan dibagi target dalam tahun berjalan kali 100%			
kegiatan (sesuai nomenklatur)	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
STRUKTUR	Pokja pengawasan dan peredaran tanaman pangan		pokja pengawasan dan peredaran hortikultura dan perkebunan	
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah pengawasan peredaran benih tanaman pangan		Jumlah pengawasan peredaran benih hortikultura dan perkebunan	
FORMULASI	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran benih tanaman pangan yang dilakukan		Jumlah pengawasan peredaran benih hortikultura dan perkebunan yang dilakukan	
SUB KEGIATAN	SK 1 : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	SK 2 : pengawasan mutu dan peredaran benih hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan	SK 1 : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	SK 2 : pengawasan mutu dan peredaran benih hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan
INDIKATOR SUB KEGIATAN	IK 1: Jumlah sertifikat benih IK 2 : Luas sertifikasi benih tanaman pangan Ik 3 : Jumlah pengujian mutu sertifikasi benih tanaman pangan	IK 1 : Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. (tanaman pangan)	IK 1 : Luas pemeriksaan sertifikasi bibit hortikultura sayuran IK 2 : Jumlah pemeriksaan sertifikasi bibit hortikultura buah Ik 3 : Jumlah pemeriksaan sertifikasi bibit perkebunan Ik 4 : Jumlah pengujian mutu sertifikasi benih hortikultura sayuran	Ik 1 : Jumlah benih unggul bersertifikat hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. IK 2 : Jumlah benih unggul bersertifikat perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga.
FORMULASI	IK 1: Jumlah sertifikat benih tahun berjalan IK 2 : Luas sertifikasi benih tanaman pangan tahun berjalan Ik 3 : Jumlah pengujian mutu sertifikasi benih tanaman pangan tahun berjalan	IK 1 : Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. (tanaman pangan) tahun berjalan	IK 1 : Luas pemeriksaan sertifikasi bibit hortikultura sayuran tahun berjalan IK 2 : Jumlah pemeriksaan sertifikasi bibit hortikultura buah tahun berjalan Ik 3 : Jumlah pemeriksaan sertifikasi bibit perkebunan tahun berjalan Ik 4 : Jumlah pengujian mutu sertifikasi benih hortikultura sayuran tahun berjalan	Ik 1 : Jumlah benih unggul bersertifikat hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. tahun berjalan IK 2 : Jumlah benih unggul bersertifikat perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga.tahun berjalan
SSK				
FORMULASI				

NOMENKLATUR PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
STRUKTUR	Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wilayah Semarang			
INDIKATOR PROGRAM	IK : Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH-bun Wilayah Semarang			
formulasi	Realisasi produksi benih (tanaman pangan dan Hortikultura dan perkebunan) tahun berjalan dibagi target produksi benih tahun berjalan dikali 100%			
kegiatan (sesuai nomenklatur)	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
STRUKTUR	Pokja Benih Tanaman Pangan	Pokja Benih Hortikultura dan Perkebunan		
INDIKATOR KEGIATAN	IK 1 : JJumlah produksi benih padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat	IK 1 : Jumlah produksi benih tanaman buah IK 2 : Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk hortikultura IK 3 : Jumlah produksi benih sayuran ik 4 : Jumlah produksi benih tanaman semusim IK 5 : Jumlah produksi benih rempah penyegar IK 5: Jumlah tanaman produksi perkebunan yang dipelihara		
FORMULASI				
SUB KEGIATAN	Sub kegiatan Perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji /benih	sub kegiatan Perbanyakan benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang	Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Berserrtifikat Perkebunan Berbentuk mata tumbuh	Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Berserrtifikat Perkebunan Berbentuk stek
INDIKATOR SUB KEGIATAN	IK 1 : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (padi) Ik 2 : Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat I	IK 1 : Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak IK 2 : Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan IK 3 : Jumlah pengembangan benih sayura n	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk stek
FORMULASI	IK 1 : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (padi) tahun berjalan Ik 2 : Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat tahun berjalan	IK 1 : Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak tahun berjalan IK 2 : Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan tahun berjalan IK 3 : Jumlah pengembangan benih sayuran tahun berjalan	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang tahun berjalan	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk stek tahun berjalan
SSK				
FORMULASI				

NOMENKLATUR PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
STRUKTUR	Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wilayah Surakarta			
INDIKATOR PROGRAM	IK : Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH-bun Wilayah Surakarta			
formulasi	Realisasi produksi benih (tanaman pangan dan Hortikultura dan perkebunan) tahun berjalan dibagi target produksi benih tahun berjalan dikali 100%			
kegiatan (sesuai nomenklatur)	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
STRUKTUR	Pokja Benih Tanaman Pangan	Pokja Benih Hortikultura dan Perkebunan		
INDIKATOR KEGIATAN	IK 1 : JJumlah produksi benih padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat	IK 1 : Jumlah produksi benih tanaman buah IK 2 : Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk hortikultura IK 3 : Jumlah produksi benih sayuran ik 4 : Jumlah produksi benih rempah penyegar IK 56: Jumlah tanaman produksi perkebunan yang dipelihara		
FORMULASI				
SUB KEGIATAN	Sub kegiatan Perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji /benih	sub kegiatan Perbanyakan benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang	Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Berserrtifikat Perkebunan Berbentuk batang	Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Berserrtifikat Perkebunan Berbentuk stek
INDIKATOR SUB KEGIATAN	IK 1 : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (padi) Ik 2 : Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat I	IK 1 : Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak IK 2 : Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi yang diperbanyak pemeliharaan IK 3 : Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan	Jumlah pohon tanaman produksi perkebunan yang dipelihara	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk stek
FORMULASI	IK 1 : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (padi) tahun berjalan Ik 2 : Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat tahun berjalan	IK 1 : Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak tahun berjalanIK 2 : Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi yang diperbanyak pemeliharaan tahun berjalan IK 3 : Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan tahun berjalan	Jumlah pohon tanaman produksi perkebunan yang dipelihara tahun berjalan	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk stek tahun berjalan
SSK				
FORMULASI				

NOMENKLATUR PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
STRUKTUR	Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wilayah Banyumas		
INDIKATOR PROGRAM	IK : Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH-bun Wilayah banyumas		
formulasi	Realisasi produksi benih (tanaman pangan dan Hortikultura dan perkebunan) tahun berjalan dibagi target produksi benih tahun berjalan dikali 100%		
kegiatan (sesuai nomenklatur)	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
STRUKTUR	Pokja Benih Tanaman Pangan	Pokja Benih Hortikultura dan Perkebunan	
INDIKATOR KEGIATAN	IK 1 : JJumlah produksi benih padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat	IK 1 : Jumlah produksi benih tanaman buah IK 2 : Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk hortikultura IK 3 : Jumlah produksi benih tanaman semusim IK 4 : Jumlah produksi benih rempah penyegar IK 5 : Jumlah tanaman produksi perkebuna	
FORMULASI			
SUB KEGIATAN	Sub kegiatan Perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji /benih	sub kegiatan Perbanyakan benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang	Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk stek
INDIKATOR SUB KEGIATAN	IK 1 : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (padi) Ik 2 : Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat I	IK 1 : Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak IK 2 : Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan IK 3 : Jumlah produksi tanaman hias	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk stek
FORMULASI	IK 1 : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (padi) tahun berjalan Ik 2 : Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat tahun berjalan	IK 1 : Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak tahun berjalan IK 2 : Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan tahun berjalan IK 3 : Jumlah produksi tanaman hias tahun berjalan	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk stek tahun berjalan
SSK			
FORMULASI			

NOMENKLATUR PROGRAM	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
STRUKTUR	Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A			
INDIKATOR PROGRAM	IK 1 : Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan IK 2 : Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura dan Perkebunan IK3 : Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanamna Pangan IK 4 : Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura dan Perkebunan			
formulasi	IK 1 : luasan serangan OPT tanaman pangan tahun sebelumnya dikurangi luasan serangan OPT tahun berjalan dikali 100% IK 2 : Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura dan Perkebunan IK 3 : Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanamna Pangan IK 4 : Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura dan Perkebunan			
kegiatan (sesuai nomenklatur)	Pengendalian dan Penanganan Bencana Pertanian Provinsi			
STRUKTUR	Pokja Perlindungan Tanaman Pangan		Pokja Perlindungan Tanaman perkebunan dan Hortikultura	
INDIKATOR KEGIATAN	IK1 : Jumlah Luas pengendalian pengendalian serangan OPT komoditas tanaman pangan IK2 : Jumlah gerakan penanganan DPI Komoditas Tanaman Pangan		IK1 : Jumlah luas pengendalian serangan OPT komoditas hortikultura dan perkebunan IK2 : Jumlah gerakan penanganan DPI Komoditas Hortikultura dan Perkebunan	
FORMULASI	IK1 : Jumlah penanganan OPT tanaman pangan tahun berjalan IK2 : Jumlah pengendalian serangan DPI tanaman pangan tahun berjalan		IK1 : Jumlah penanganan OPT perkebunan dan hortikultura tahun berjalan IK2 : Jumlah pengendalian serangan DPI perkebunan dan hortikultura tahun berjalan	
SUB KEGIATAN	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan yang ditangani (tanaman pangan)	:Jumlah Luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan yang ditangani (hortikulturan dan perkebunan)	:Jumlah Luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan
FORMULASI	Jumlah area terdampak perubahan iklim yang ditangani tahun berjalan	Jumlah penanganan OPT komoditas tanaman pangan tahun berjalan	Jumlah area terdampak perubahan iklim yang ditangani tahun berjalan	Jumlah penanganan OPT komoditas Perkebuann dan hortikultura tahun berjalan
SSK				
FORMULASI				

NOMENKLATUR PROGRAM	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
STRUKTUR	Balai Pelatihan Pertanian	
INDIKATOR PROGRAM	IK : Persentase SDM pertanian yang dilatihh	
formulasi	Realisasi SDM pertanian yang dilatih dibagi target SDM pertanian yang dilatih pada tahun berjalan dikalikan 100%	
kegiatan (sesuai nomenklatur)	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
STRUKTUR	pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	pokja Penjaminan Mutu Pelatihan, Bimbingan Teknis Pertanian dan Peternakan
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah SDM petani yang terfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan pelayanan teknis	Jumlah SDM petani yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi teknis
FORMULASI	Jumlah SDM petani yang dilatih pada tahun berjalan	Jumlah SDM petani yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi kompetensi teknis pada tahun berjalan
SUB KEGIATAN	Diseminasi Informasi Teknis Sosial, Ekonomi, dan Inovasi Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan
FORMULASI	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian tahun berjalan	Jumlah petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan pada tahunberjalan
SSK		
FORMULASI		

NOMENKLATUR PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
STRUKTUR	BB Mektan	
INDIKATOR PROGRAM	IK : Persentase capaian alsintan dan pengelola alsintan yang diawasi IK 2 : Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan	
formulasi	IK 1 : Jumlah pengelola alsintan yang diawasi pada tahun berjalan dibagi jumlah pengelola alsintan di Jateng dikali 100% IK 2 : Jumlah realisasi alsintan yang direkayasa dan dikembangkan pada tahun berjalan dibagi target alsintan yang direkayasan dan dikembangkan pada tahun berjalan dikali 100%	
kegiatan (sesuai nomenklatur)	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
STRUKTUR	pokja standarisasi, pengujian dan pengawasan	pokja rekayasa dan pengembangan
INDIKATOR KEGIATAN	IK 1 : Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran alsintan serta pengelola alsintan	Jumlah rekayasa dan pengembangan alsintan
FORMULASI	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran alsintan serta pengelola alsintan pada tahun berjalan	Jumlah rekayasa dan pengembangan alsintan pada tahun berjalam
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah laporan pengawasan alsintan dan pengembangan pengelola alsintan	Jumlah laporan rekomendasi rekayasa teknis alsintan
FORMULASI	Jumlah laporan pengawasan alsintan dan pengembangan pengelola alsintan tahun berjalan	Jumlah laporan rekomendasi rekayasa teknis alsintan tahun berjalan
SSK		
FORMULASI		

SASARAN DAERAH	**Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan** **IK : Pertumbuhan Ekonomi**			
TUJUAN OPD	**Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian**			
	IK: Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian			
DEFINISI OPERASIONAL	**Pertumbuhan produksi barang dan jasa sektor pertanian di wilayah perekonomian Jawa tengah dalam selang waktu 1 tahun (data sesuai rilis BPS)**			
SASARAN OPD	Meningkatnya Produksi Pertanian			
	Persentase kenaikan jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitas usahanya			
FORMULASI	Jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan terfasilitasi tahun sekarang dibagi jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil keseluruhan dikali 100%			
NOMENKLATUR PROGRAM	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			
STRUKTUR	**Bidang Kelembagaan**			
INDIKATOR PROGRAM	IK 1 : Prosentase kelembagaan petani yang terfasilitasi Ik : pasca panen peternakan ...			
formulasi	Persentase Positif jumlah kelembagaan petani terfasilitas tahun ini dibagi jumlah kelembagaan petani di Jawa Tengah			
kegiatan (sesuai nomenklatur)	Kegiatan Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian			Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
STRUKTUR	Pokja Kelembagaan	Pokja Pembiayaan	Pokja Kerjasama	Pokja Kelembagaan
INDIKATOR KEGIATAN	IK 1 : jumlah kelembagaan petani yang terfasilitasi	IK 1 : Jumlah kelompok petani yang terfasilitasi asuransi dan pembiayaan pertanian	IK 1 : Jumlah fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang pertanian	IK 1 : Jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi
FORMULASI	Jumlah kelembagaan petani yang terfasilitasi	Jumlah kelompok petani yang terfasilitasi asuransi dan pembiayaan pertanian	Jumlah fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang pertanian	Jumlah kelembagaan petani yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi korporasi
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Jumlah laporan fasilitasi asuransi dan pembiayaan pertanian	Jumlah laporan fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang pertanian	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi
FORMULASI	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Jumlah laporan fasilitasi asuransi dan pembiayaan pertanian	Jumlah laporan fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang pertanian	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi
SSK				
FORMULASI				

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risisko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Manajemen risiko pembangunan pertanian selama 5 (lima) tahun mendatang sebagaiamanan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.5.
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyata-an Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penang-gung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan Strategis:								
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor pertanian							
Sasaran Strategis:								
Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Tanaman Pangan	Produksi komoditas tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) tidak mencapai target	16	Terjadinya gagal panen	Pendapatan petani menurun	Sosialisasi *Good Agriculture Practice* (GAP) serta pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim	Kepala Dinas	Tahun 2025 - 2029
Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Tanaman Hortikultura	Produksi bawang merah tidak mencapai target	6	Terjadinya gagal panen	Pendapatan petani menurun	Pertemuan, koordinasi dan sosialisasi	Kepala Dinas	Tahun 2025 - 2029
Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi tebu tidak mencapai target	6	Terjadinya gagal panen	Produksi tebu tidak mencapai target	Pertemuan, koordinasi dan sosialisasi	Kepala Dinas	Tahun 2025 - 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Pernyata-an Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penang-gung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase kenaikan jumlah kelembagaan petani dan peternak yang meningkat kapasitas usahanya	Kelembagaan petani belum berkembang optimal	6	Kurangnya minat dan partisipasi kelembagaan	Kapasitas Usaha Petani dan Peternak belum optimal	Pelatihan dan Pendampingan kelembagaan	Kepala Dinas	Tahun 2025 - 2029
Meningkatnya Produksi Ternak	Produksi Ternak	Serangan penyakit hewan menular strategis	16	Tingginya mobilitas ternak antar daerah	Kerugian ekonomi peternak	Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak dan vaksinasi	Kepala Dinas	Tahun 2025-2029
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Nilai Sakip menurun	10	Layanan Publik belum optimal	Menurunnya kepercayaan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kepala Dinas	Tahun 2025 - 2029
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Manajemen Risiko Belum Optimal	10	Indeks Manajemen Risiko Menurun	Pemahaman Manajemen resiko terbatas	Monitoring Evaluasi Risiko	Kepala Dinas	Tahun 2025 - 2029

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan menyelaraskan isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat nasional yang kemudian diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang sesuai dan terarah. Dokumen renstra disusun dengan mempedomani KLHS RPJMD, RPJMD Tahun 2025-2029, RTRW Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Renstra Kementerian ESDM, dan RPJMN Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak. Gambaran keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya sebagai berikut:

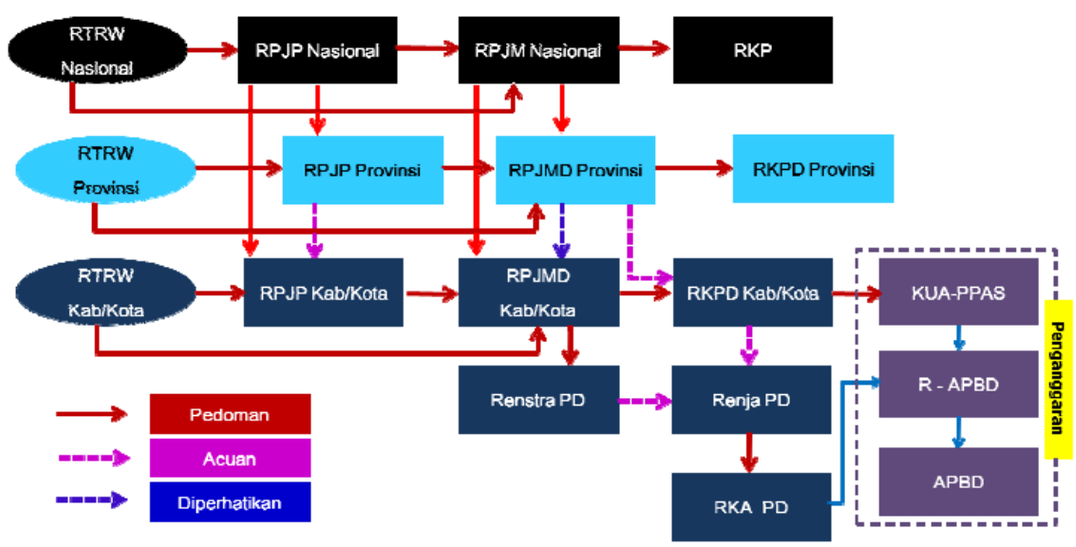

Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor rill. Terdapat beberapa peran penting dari sektor ESDM antara lain sebagai sumber penerimaan negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi di bidang energi, penyediaan energi yang berkelajutan dalam rangka ketahanan energi dan bahan baku domestik dan kegiatan ESDM yang menimbulkan efek berantai serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Pada akhirnya, Renstra Dinas ESDM Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 104);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : (5-66/2025);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 27);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 28);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 29).
27. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan selama lima tahun, agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM;
2. Menetapkan program, kegiatan, dan indikator kinerja sektor energi dan sumber daya mineral untuk periode lima tahun;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
4. Menyediakan tolok ukur evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB. I Pendahuluan

Berisi latar belakang dan landasan hukum penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta uraian singkat tentang sistematika penulisan Renstra.

BAB. II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026, dan mengulas hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini

BAB. III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi Tujuan dan Sasaran serta Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

BAB. IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatifnya, serta memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB. V Penutup

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasi ini merupakan hasil penataan kembali SOTK berdasarkan rekomendasi evaluasi oleh Mendagri dengan surat nomor 061/9383/SJ tanggal 27 Desember 2017. Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Tugas pokok Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, yaitu membantu Gubernur "**melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah**". Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
b. pelaksanaan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan susunan organisasi, rincian komposisi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Geologi dan Air Tanah;
4. Bidang Mineral dan Batubara;
5. Bidang Ketenagalistrikan;
6. Bidang Energi Baru Terbarukan dan konservasi energi;
7. Cabang Dinas;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja per 1 Juni 2025 sebagaimana dalam Gambar 2.1., komposisi jabatan struktural di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 1 (satu) Pejabat Eselon II/a, 5 (lima) Pejabat Eselon III/a, 11 (sebelas) Pejabat Eselon III/b dan 41 (empat puluh satu) Pejabat Eselon IV/a.

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah memiliki 10 (sepuluh) Cabang Dinas setingkat eselon III/b yaitu : Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan, Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang Demak, Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi dan Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah. Sedangkan untuk jabatan fungsional tertentu, sampai dengan kondisi bulan Juni 2025 terdapat 12 jabatan Inspektur Ketenagalistrikan.

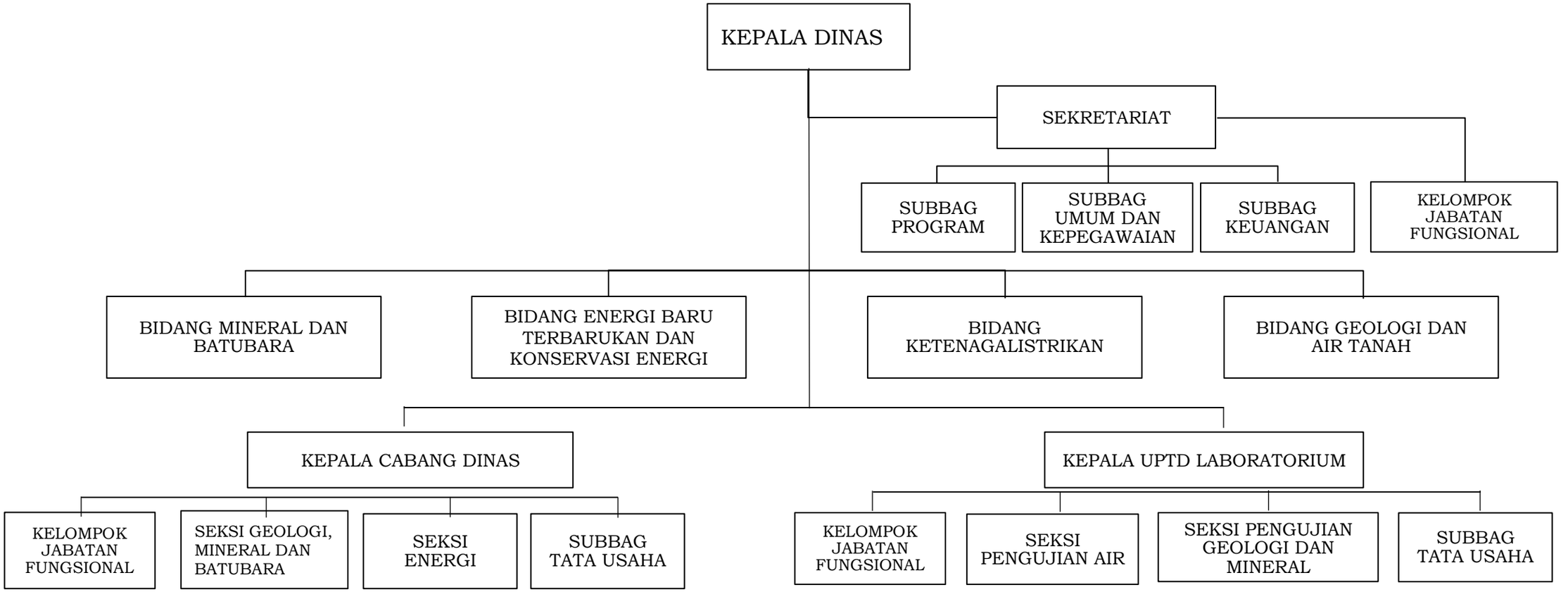

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Berikut adalah uraian tugas dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah per unit kerja, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah :

2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas. Kepala Dinas, membawahkan :

1. Sekretariat;
2. Bidang Geologi dan Air Tanah;
3. Bidang Mineral Dan Batubara;
4. Bidang Ketenagalistrikan;
5. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
6. Cabang Dinas;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

1) Subbagian Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Program

   Subbagian Program mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

2) Subbagian Keuangan

   Subbagian Keuangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

   Subbagian Umum Dan Kepegawaian melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2.1.3. Bidang Geologi dan Air Tanah

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Geologi dan Air Tanah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah melaksanakan fungsi meliputi:

a. melaksanakan penyusunan kebijakan bidang Geologi dan Air Tanah;
b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang Geologi dan Air Tanah;
c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di bidang Geologi dan Air Tanah;
d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang Geologi dan Air Tanah;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Geologi dan Air Tanah, yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah;
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Bidang Mineral dan Batubara

Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Mineral dan Batubara. Dalam melaksanakan tugas Bidang Mineral dan Batubara melaksanakan fungsi meliputi:

a. melaksanakan penyusunan kebijakan bidang Mineral dan Batubara;
b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang Mineral dan Batubara;

c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan dibidang Mineral dan Batubara;
d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan Bidang Mineral dan Batubara;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Mineral dan Batubara, yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah.

2.1.5. Bidang Ketenagalistrikan

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketenagalistrikan melaksanakan fungsi meliputi:

a. melaksanakan penyusunan kebijakan bidang Ketenagalistrikan;
b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di bidang Ketenagalistrikan;
c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di bidang Ketenagalistrikan;
d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenagalistrikan;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenagalistrikan, yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah;
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Bidang Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Energi Baru Terbarukan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi melaksanakan fungsi meliputi:

a. melaksanakan penyusunan kebijakan Bidang Energi Baru Terbarukan dan konservasi energi;
b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang Energi Baru Terbarukan dan konservasi energi;
c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di bidang Energi Baru Terbarukan dan konservasi energi;
d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang Energi Baru Terbarukan dan konservasi energi;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Energi Baru Terbarukan dan konservasi energi, yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah;
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7. Cabang Dinas ESDM

Dalam melaksanakan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas ESDM membentuk Cabang Dinas (Kelas A) yang dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas ESDM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Cabang Dinas ESDM sebanyak 10 (sepuluh), yaitu :

1. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Solo;
2. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria;
3. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara;
4. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Selatan;
5. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Utara;
6. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Selatan;
7. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan;
8. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Tengah;
9. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi;
10. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Semarang – Demak.

Adapun lokasi kantor Dinas ESDM, Cabang Dinas ESDM beserta wilayah kerjanya, dan UPTD Laboratorium dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Lokasi Kantor Dinas ESDM dan Cabang Dinas ESDM beserta Wilayah Kerjanya dan UPTD Laboratorium

Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang energi dan sumber daya mineral di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional Sub Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;

b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional Sub Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan Sub Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
d. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya,

Cabang Dinas terdiri dari :

1) Kepala Cabang Dinas;
2) Subbagian Tata Usaha;
3) Seksi Geologi, Mineral Dan Batubara;
4) Seksi Energi; dan
5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas, sedangkan untuk Seksi masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan, meliputi :

a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

2) Seksi Geologi, Mineral Dan Batubara

Seksi Geologi, Mineral Dan Batubara sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara di wilayah kerjanya, meliputi :

a. menyiapkan penyusunan rencana program dan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan bidang geologi, mineral dan batubara di wilayah kerjanya;
b. menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan Geologi, Mineral Dan Batubara di wilayah kerjanya;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan usaha di bidang Geologi, Mineral Dan Batubara;

d. menyiapkan bahan inventarisasi, pemetaan dan penyusunan neraca sumber daya air tanah potensi dan pengusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
e. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin pengusahaan air tanah, eksplorasi, juru bor, dan izin perusahaan pengeboran air tanah dalam daerah provinsi;
f. menyiapkan bahan identifikasi dan pemetaan kebencanaan geologi;
g. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, izin pertambangan rakyat, izin pendirian gudang bahan peledak, kartu izin meledakkan, pemilikan, penyimpanan bahan peledak, pembelian, dan penggunaan bahan peledak;
h. menyiapkan rekomendasi teknis izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi;
i. menyiapkanpersetujuan rencana reklamasi dan pasca tambang dan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi, reklamasi dan pasca tambang;
j. menyiapkan pengawasan dan pengendalian eksploitasi Air Tanah;
k. menyiapkan pengendalian daya rusak air tanah;
l. menyiapkan perhitungan Nilai Perolehan Air;
m. menyiapkan pemantauan kebencanaan geologi;
n. menyiapkan bahan perhitungan produksi Usaha Mineral Dan Batubara;
o. menyiapkan identifikasi dan inventarisasi usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara tanpa izin;
p. menyiapkan pengawasan administrasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
q. menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan bidang Geologi, Mineral Dan Batubara.

3) Seksi Energi

Seksi Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang energi di wilayah kerjanya, meliputi :

a. menyiapkan penyusunan rencana program dan kebijakan pengelolaan sub urusan bidang energi di wilayah kerjanya;
b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan sub urusan bidang energi di wilayah kerjanya;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan usaha sub urusan bidang energi;
d. menyiapkan bahan inventarisasi usaha jasa penunjang sub urusan energi baru terbarukan yang kegiatan usahanya dalam satu daerah;
e. menyiapkan bahan inventarisasi potensi energi baru terbarukan;
f. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
g. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

h. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang energi baru terbarukan yang kegiatannya dalam satu daerah provinsi;
i. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin penyediaan tenaga listrik dengan wilayah usaha dalam daerah provinsi, izin operasi instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih dari 200 KVA dengan instalasi dalam Daerah Provinsi, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas pemegang sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
j. menyiapkan penerbitan surat keterangan terdaftar instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih dari 25 KVA sampai dengan 200 KVA dengan instalasi dalam daerah provinsi;
k. menyiapkan bahan inventarisasi potensi sumber tenaga listrik di daerah;
l. menyiapkan bahan kajian penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen di wilayah usaha pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
m. menyiapan bahan pemberian sertifikat laik operasi dan nomor register sertifikat laik operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
n. menyiapkan bahan penyusunan data statistik ketenagalistrikan;
o. menyiapkan pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi di daerah dan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
p. menyiapkan pengawasan uji laik operasi, izin operasi dan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan;
q. menyiapkan pengawasan volume penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dalam daerah provinsi dan harga eceran tertinggi LPG tertentu di tingkat pangkalan;
r. menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan bidang energi; dan
s. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas

4) Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium ESDM

Laboratorium ESDM merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral. Laboratorium ESDM dipimpin oleh Kepala Laboratorium yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Laboratorium ESDM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dinas di bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam melaksanakan tugas, Laboratorium ESDM melaksanakan fungsi meliputi:

a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang energi dan sumber daya mineral;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang energi dan sumber daya mineral;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
d. Pengelolaan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Laboratorium ESDM, terdiri atas:

1) Kepala Laboratorium;
2) Subbagian Tata Usaha;
3) Seksi Pengujian Air;
4) Seksi Pengujian Geologi Dan Mineral; dan
5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium. Sedangkan seksi-seksi, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan, meliputi :

a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD; dan
j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Pengujian Air

Seksi Pengujian Air mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian Air, meliputi:

a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian kualitas air;
b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian kualitas air;
c. menyiapkan pelaksanaan analisa kualitas air;

d. memverifikasi surat keterangan hasil pengujian kualitas air;
e. menyiapkan pengelolaan peralatan pengujian kualitas air;
f. menyiapkan pelayanan administrasi pengujian kualitas air;
g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian Kualitas Air; dan
h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Pengujian Geologi Dan Mineral

Seksi Pengujian Geologi Dan Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian Geologi Dan Mineral, meliputi:

a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang analisis dan pengujian geologi dan mineral;
b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang analisis dan pengujian geologi dan mineral;
c. menyiapkan pelaksanaanan alisis dan pengkajian geologi dan mineral;
d. memverifikasi surat keterangan hasil analisis dan pengujian geologi dan mineral;
e. menyiapkan pengelolaan peralatan analisis dan pengujian geologi dan mineral;
f. menyiapkan pelayanan administrasi analisis dan penguji angeologi dan mineral;
g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan pengujian geologi dan mineral; dan
h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah saat ini didukung oleh sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Sampai dengan bulan Juli 2025, terdapat 227 aparatur yang berstatus aktif tersaji dalam infografis pada Gambar 2.3.

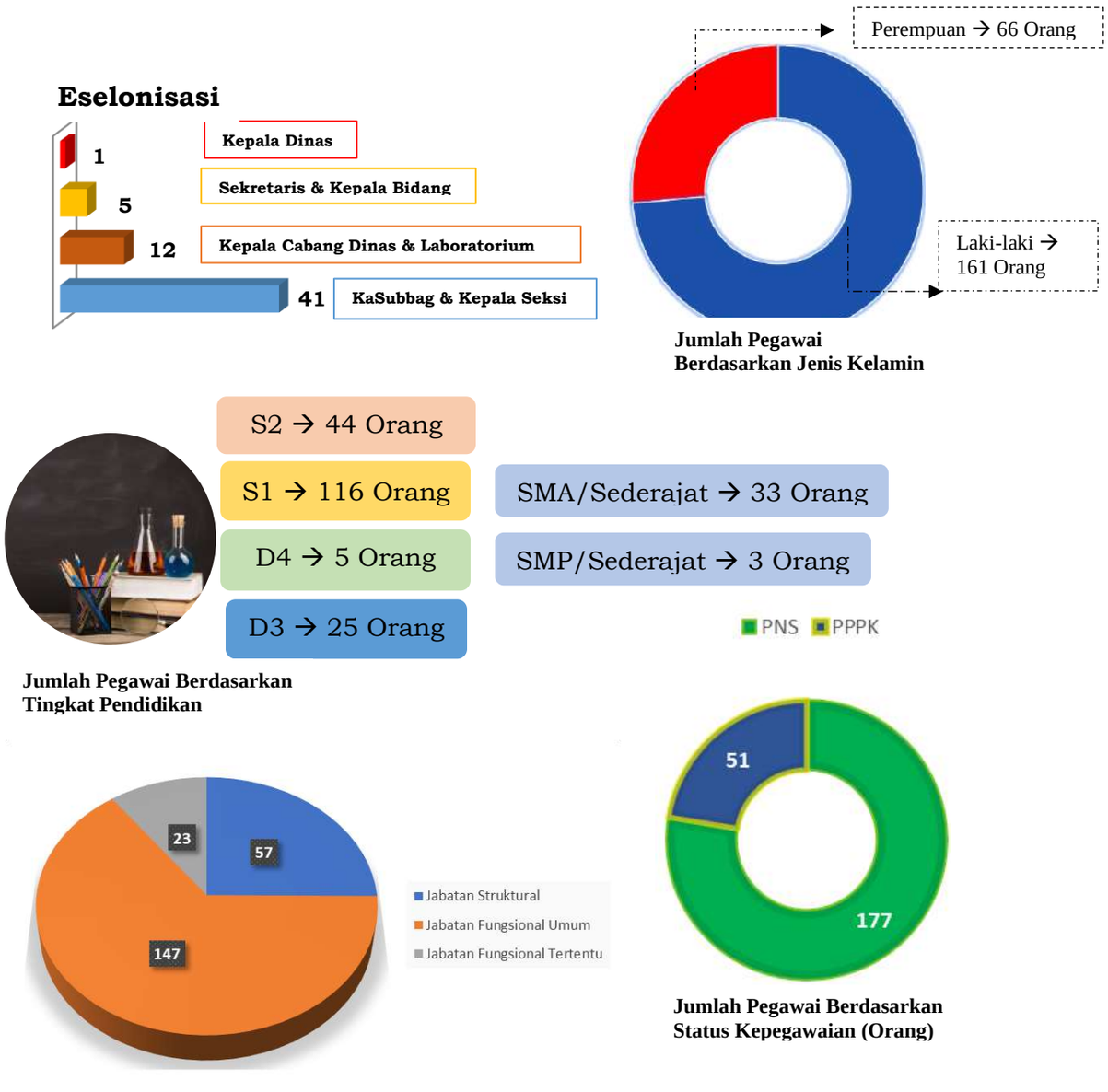

Gambar 2.3. Sumberdaya Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

Sarana prasarana fisik yang mendukung kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Gedung Kantor Dinas (Pusat) di Semarang, UPTD Laboratorium di Kabupaten Semarang dan Cabang Dinas ESDM di 10 (sepuluh) lokasi, yaitu: Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Blora, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Banjarnegara beserta perlengkapannya. Adapun kantor, alamat kantor, dan media sosial Dinas dan Cabang Dinas dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

JL. Madukoro, Blok AA-BB No.44, Semarang, Central Java, 50144, Tawangmas, Semarang Barat, Semarang City, Central Java 50144
Telp. (0286) +6224 7608203, 7610121 , Fax (0286) 5960233

esdm_jateng | @ESDMJateng | @esdmjateng7353

Esdm Prov Jateng | http://esdm.jatengprov.go.id/

Cabang Dinas ESDM Wil. Solo

Jl. Sindoro Raya, Mojosongo, Jebres, Surakarta
Telp 0271 (6003006) Fax 0271 (6003007)

esdm_solo | @esdm_solo

Cabang Dinas ESDM Wil. Kendeng Muria

Jl. Panglima Sudirman No.5, Kel. Plangitan, Kec. Pati Kota, Pati
Telp. (0295) 386120, Fax (0295) 386119

esdmkendengmuria | @kendengmuria_

Cabang Dinas ESDM Wil. Serayu Selatan

Jl. Jend. Sudirman No.10, Kel. Pangenjuru Tengah, Kec. Purworejo, Purworejo
Telp. (0275) 324134, Fax (0275) 323685

esdm_ss

Cabang Dinas ESDM Wil. Serayu Utara

Jl. Patimura No.1, Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur, Pekalongan
Telp. (0285) 4416554, Fax (0285) 4416553

esdm_serayu_utara | @serayuutara

Cabang Dinas ESDM Wil. Slamet Utara

Jl. Piere Tendean No.1, Kota Tegal
Telp. (0283) 351463

esdmslametutara | @slamet_utara

Cabang Dinas ESDM Wil. Kendeng Selatan

Jl. Blora-Rembang Km.3, Kel. Karangjati, Kec. Blora, Blora
Telp. (0296) 5301660, Fax (0296) 5300731

esdm_kendengselatan | @esdm_ks

Cabang Dinas ESDM Wil. Slamet Selatan

Jl. Ahmad Yani No.30 Purwokerto
Telp. (0281) 6570854, Fax (0281) 6841868

esdm_slametselatan | @slametselatan1

Cabang Dinas ESDM Wil. Serayu Tengah

Jl. KH. Ahmad Dahlan no. 39, Ds. Wanadadi, Kec. Wonodadi, Banjarnegara
Telp. (0286) 5960237, Fax (0286) 5960233

cabdinesdmserayutengah | @Serayu_Tengah

Gambar 2.4. Kantor Dinas, UPTD Laboratorium ESDM dan Cabang Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

2. Rumah Dinas di Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo 1 (satu) unit, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria 1 (satu) unit, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara 1 (satu) unit, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan 1 (satu) unit, dan Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan 1 (satu) unit;

Gambar 2.5. Rumah Dinas di Cabang Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

3. Mess di Dinas (Pusat) di Semarang 1 (satu) unit, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara 1 (satu) unit; Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan 1 (satu) unit; Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang Demak 1 (satu) unit; dan Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah 1 (satu) unit;

Gambar 2.6. Mess di Dinas dan Cabang Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

4. Mobil dinas sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit, yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) unit mobil berbahan bakar bbm dan 1 (satu) unit mobil listrik, serta sepeda motor sebanyak 26 (dua puluh enam) unit, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) unit motor berbahan bakar bbm dan 7 (tujuh) unit motor listrik.

Selain sarana gedung perkantoran dan sarana mobilitas (kendaraan roda-2 dan roda-4) sebagaimana tersebut di atas, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah didukung pula oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja, seperti peralatan komputer, *notebook, printer*, perlengkapan-perlengkapan *survey* di bidang pertambangan dan energi, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mencakup berbagai sektor pengelolaan yang saling terintegrasi antara lain pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi, mineral dan batubara, aspek kegeologian dan air tanah serta ketenagalistrikan.

Upaya meningkatkan sinergitas dan peran serta pemangku kepentingan sebagai upaya dalam mendukung pemerintah mewujudkan pelayanan publik di bidang geologi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyelenggarakan kegiatan Geo Appreciation Night 2023 yang bertujuan untuk mengapresiasi peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan bidang geologi yang diselenggarakan pada Jumat, 18 Agustus 2023 bertempat di Museum Geologi, Badan Geologi. Para penerima penghargaan telah menunjukkan dedikasi dan inovasi terutama dalam konservasi, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Pada ketegori Geo-Environment ini terdapat 2 subkategori yaitu pertama, Best in Alignment with Goals, yang diberikan kepada pemangku kepentingan yang secara konsisten menunjukkan tekad dan tindakan yang selaras dengan pilar Geo-Environment dalam pencapaian tujuan program

dari Badan Geologi. Dan kedua yaitu kategori Best in Adaptability and Flexibility, dimana penghargaan ini diberikan kepada pemangku kepentingan yang berhasil beradaptasi dengan perubahan keadaan, menawarkan solusi dan penyesuaian yang membantu mengatasi dalam mengatasi tantangan. Selanjutnya untuk penghargaan Geo-Environment pada kategori *Best in Adaptability and Flexibility*, diberikan kepada: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah).

Peningkatan kualitas tata kelola sektor mineral dan batubara dilakukan kerja sama dan sinergitas seperti pemberian penghargaan, serta penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Salah satu bentuk kerja sama strategis adalah dengan PPSDM Geominerba dalam penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan RKAB maupun pelatihan Pra POP (Pengawas Operasional Pertama). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan tenaga teknis pertambangan agar memahami regulasi sekaligus mampu menerapkan kaidah pertambangan yang baik di lapangan. Di sisi lain, sebagai wujud apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, Dinas ESDM memberikan Penghargaan *Good Mining Practice* (GMP) kepada pelaku usaha pertambangan yang konsisten menjaga keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, guna mengoptimalkan penerimaan daerah, Dinas ESDM bersama Bapenda Provinsi maupun Bapenda Kabupaten/Kota secara berkelanjutan melaksanakan rekonsiliasi data produksi dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Upaya ini memperkuat sinkronisasi data, meningkatkan akurasi perhitungan pajak, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah melalui tata kelola pertambangan yang transparan dan akuntabel.

Sektor ketenagalistrikan di Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang semakin solid melalui sinergi yang kuat bersama para pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan energi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan. Salah satu langkah nyata adalah penyelenggaraan pelatihan serta sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan bagi siswa SMK, yang bertujuan menyiapkan tenaga kerja terampil dan bersertifikat agar mampu bersaing di dunia industri, sekaligus mendukung pembangunan ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Selain itu, capaian signifikan juga terlihat dari pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin. Melalui kerja sama lintas sektor, tercatat pada tahun 2024, sebanyak 27.977 keluarga yang sebelumnya belum menikmati layanan listrik kini telah mendapatkan akses energi secara layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, mendukung pendidikan anak, serta memperluas aktivitas ekonomi rumah tangga.

Berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari sejumlah upaya strategis yang telah dilaksanakan. Pertama, koordinasi dan sinkronisasi dengan pengampu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan prioritas sasaran program benar-benar menyentuh kelompok masyarakat miskin dan rentan. Kedua, menjalin kolaborasi erat dengan PT PLN (Persero) selaku penyedia utama tenaga listrik di Jawa Tengah, dalam rangka menjamin ketersediaan energi listrik yang andal dan berkualitas sehingga mampu mendorong tumbuhnya bisnis serta

kawasan industri baru. Ketiga, mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan di sektor ketenagalistrikan secara cepat, transparan, dan bebas biaya, agar dunia usaha tidak menghadapi hambatan dalam menjalankan aktivitasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat komitmen transisi energi bersih, melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Jawa Tengah juga aktif mendorong pembangunan PLTS irigasi (PATS), digester biogas dan utilisasi *biogenic shallow gas* melalui dukungan APBD, APBN, hingga dana desa, menjadikan kondisi ini sebagai salah satu tumpuan pembangunan energi berkelanjutan. Komitmen ini tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan PLTS dilaksanakan di berbagai lembaga pendidikan, seperti pondok pesantren dan SMK di Jawa Tengah, guna menumbuhkan generasi yang sadar energi terbarukan. Seiring itu, penjangkauan publik dilakukan secara luas melalui kampanye, sosialisasi, dan forum, antara lain *Central Java Solar Province*, *Local Government Forum*, *Green Healthcare Forum*, *Jateng Solar Series*, hingga kegiatan Jelajah Energi yang mengajak masyarakat dan pelaku industri untuk ikut serta dalam percepatan transisi energi. Publikasi berupa riset, kajian bersama lembaga seperti IESR, serta penerbitan buku "Jelajah Energi" semakin memperkuat komunikasi dan kesadaran publik.

Pada bagian tak terpisahkan, pelaksanaan sektoral diperkuat dengan inovasi teknologi informasi yang dikembangkan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan mendukung kinerja dan pelayanan antara lain :

1. Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan (e-SILUP)

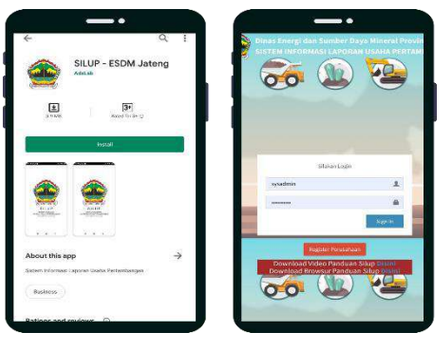

Aplikasi ini disediakan untuk membantu para pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaporkan jumlah produksi tambang yang sudah diusahakan, secara online melalui gadget (*smartphone*) maupun PC dengan mudah dan cepat setiap bulannya. Sistem ini dapat diakses melalui http://silup.esdm.jatengprov.go.id.

2. Sistem Informasi Pertambangan Tanpa Izin (e-SIPETI)

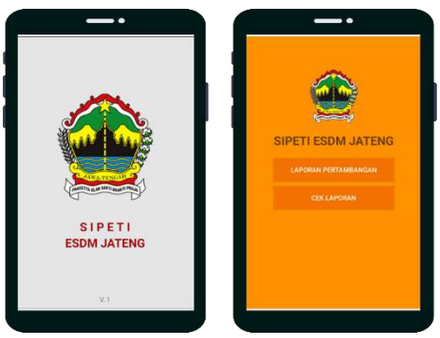

Sistem Informasi Pertambangan Tanpa Izin berbasis Mobile (SIPETI) yang merupakan layanan pengaduan dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi ini dapat diunduh mandiri melalui https://play.google.com/store/apps/details?id=app.esdmjtg.sipeti .

3. Sistem Informasi Laboratorium (e-SILAB)

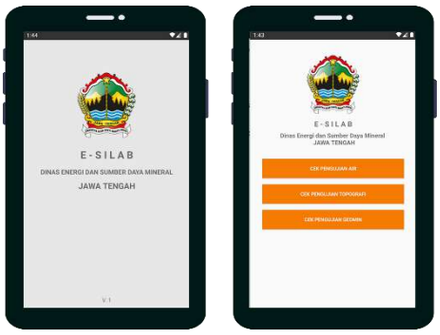

Aplikasi ini disediakan untuk mengetahui progress layanan, mulai dari pendaftaran hingga diterbitkannya sertifikasi hasil uji laboratorium secara mudah dan cepat melalui gadget (*smartphone*) maupun PC. Sistem ini dapat diakses melalui https://esilab.miyapps.info/ .

4. Sistem Informasi Air Tanah (e-SIAT)

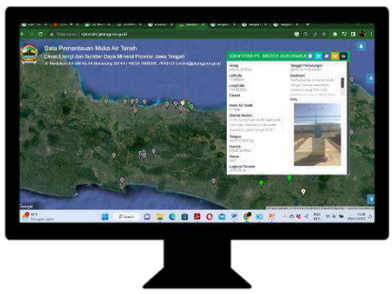

Aplikasi ini disediakan untuk mengetahui fluktuasi muka air tanah yang dipantau melalui sumur pantau secara realtime yang tersebar di Jawa Tengah secara mudah dan cepat melalui gadget (*smartphone*) maupun PC. Sistem ini dapat diakses melalui http://siat.esdm.jatengprov.go.id.

5. Sistem Informasi Database Ketenagalistrikan (e-SIGANTENG)

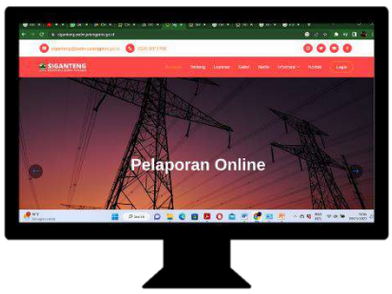

Aplikasi ini dikembangkan untuk memberikan layanan kepada publik untuk mengetahui database obyek perizinan/pelayanan ketenagalistrikan, database sistem ketenagalistrikan *On-Grid*, database potensi energi primer dan EBT, serta database kondisi listrik perdesaan. Sistem ini dapat diaksesmelalui http://siganteng.esdm.jatengprov.go.id.

6. Sistem Aplikasi dan Pelaporan Energi Baru Terbarukan (e-SIAPEBT)

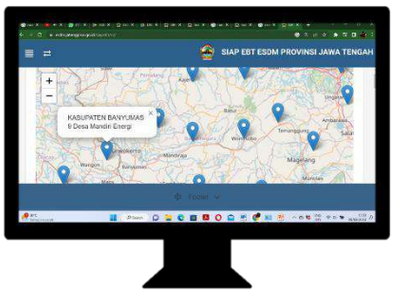

Aplikasi ini dikembangkan untuk inventarisasi data pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Jawa Tengah secara efektif dan efisien, serta sebagai akses pendaftaran peserta DME dan HEA. Sistem ini dapat diakses melalui http://siapebt.esdm.jatengprov.go.id.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya pada sektor energi dan sumber daya mineral yang strategis bagi kehidupan masyarakat. Berbagai program dan kegiatan yang dijalankan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi target perencanaan, tetapi juga untuk menjawab tantangan nyata di lapangan, mulai dari kebutuhan energi yang andal, pemanfaatan sumber daya secara bijak, hingga percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah pada periode 2020–2024 merupakan pelaksanaan dari dua dokumen perencanaan strategis, yaitu Renstra 2018–2023 sebagai pijakan awal dan Renstra 2024–2026 sebagai arah lanjutan. Adapun rincian capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	**Renstra Dinas ESDM Tahun 2018 – 2023**																			
1	**Indikator Tujuan**																			
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%				2,1	2,1	2,1	2,1		2,21	2,41	2,44	2,29		105,24	114,76	116,19	109,05	
A	**Indikator Sasaran**																			
	Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	%				65,5	66	66,5	67		66,4	66,51	80,32	89,79		101,37	100,77	120,78	134,01	
a	**Indikator Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**																			
	Persentase Good Mining Practice	%				73,33	85,71	85,71	85,71		74,20	86,20	89,00	96,53		101,19	100,57	103,84	112,62	
	Persentase Good Mining Practice Wilayah Solo	%				6,13	6,57	6,57	6,57		9,34	10,99	5,46	7,89		152,31	167,21	83,11	120,09	
	Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Muria	%				2,67	2,86	2,86	2,86		4,18	4,51	5,39	4,42		156,44	157,59	188,46	154,55	
	Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Utara	%				5,87	6,29	6,29	6,29		6,63	7,32	5,68	7,57		113,01	116,44	90,30	120,35	
	Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Selatan	%				4	4,29	4,29	4,29		2,95	5,07	4,89	4,73		73,71	118,19	113,99	110,26	
	Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Utara	%				8,8	12	12	12		4,42	4,79	12,67	12,93		50,26	39,91	105,58	107,75	

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	**Satuan**				**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Persentase Good Mining Practice Wilayah Ungaran Telomoyo	%				2,67	2,86	2,86	2,86		3,19	3,38	3,00	3,47		119,63	118,19	104,90	121,33	
	Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Selatan	%				8,8	11,43	11,43	11,43		11,30	12,39	14,29	11,67		128,43	108,44	125,02	102,10	
	Persentase Good Mining Practice Wilayah Sewu Lawu	%				4,8	5,14	5,14	5,14		10,81	12,68	5,28	5,99		225,23	246,62	102,72	116,54	
	Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Selatan	%				11,2	14,29	14,29	14,29		5,16	7,32	13,68	14,51		46,07	51,25	95,73	101,54	
	Persentase Good Mining Practice Wilayah Semarang Demak	%				3,73	4	4	4		4,91	5,35	4,23	5,99		131,74	133,80	105,75	149,75	
	Persentase Good Mining Practice Wilayah Merapi	%				12	13,14	13,14	13,14		4,18	4,79	10,15	13,25		34,81	36,44	77,25	100,84	
	Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Tengah	%				2,67	2,86	2,86	2,86		7,13	7,61	4,23	4,10		266,87	265,93	147,90	143,36	
	Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
B	**Indikator Sasaran**																			
	Indeks Ketersediaan air tanah	Angka				3,03	3,02	3	2,99		3,05	3,61	3,67	3,76		100,66	119,54	122,33	125,75	
b	**Indikator Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**																			
	Persentase pengambilan air tanah	%				54,93	55,2	55,48	55,76		46,93	45,99	48,22	43,64		117,05	120,03	115,06	127,77	

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%				4,13	4,15	4,17	4,2		3,94	3,55	3,38	4,09		104,82	116,90	123,37	102,69	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%				12,42	12,48	12,54	12,6		9,32	7,22	9,62	10,46		133,26	172,85	130,35	120,46	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%				2,87	2,88	2,89	2,91		2,46	2,64	2,77	1,92		116,67	109,09	104,33	151,56	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%				1,15	1,16	1,16	1,17		0,9	0,65	1,07	1		127,78	178,46	108,41	117	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%				0,96	0,97	0,97	0,97		0,87	0,89	0,79	0,83		110,34	108,99	122,78	116,87	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%				8,35	8,39	8,43	8,47		6,34	8,39	7,83	7,14		131,70	100	107,66	118,63	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%				0,6	0,6	0,6	0,61		0,6	0,58	0,58	0,57		100	103,45	103,45	107,02	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%				3,26	3,28	3,29	3,31		3,12	2,36	2,84	2,60		104,43	138,98	115,85	127,31	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%				1,08	1,09	1,1	1,1		1,05	1,09	1,07	1,02		102,86	100	102,80	107,84	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%				14,59	14,67	14,74	14,81		12,96	14,18	12,85	9,67		112,58	103,46	114,71	153,15	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%				5,28	5,31	5,33	5,36		5,14	4,14	5,18	4,05		102,72	128,26	102,90	132,35	

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	**Satuan**				**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%				0,24	0,25	0,25	0,25		0,23	0,22	0,23	0,22		104,35	113,64	109,70	113,64	
	Persentase pelayanan pengujian air tanah	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
2	**Indikator Tujuan**																			
	Konsumsi listrik per kapita	kWh/Kapita				780,36	825,37	872,24	921,69		788,22	828,34	878,9	1103,75		101,01	100,36	100,76	119,75	
A	**Indikator Sasaran**																			
	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%				11,6	12,94	14,85	15,96		11,89	13,38	15,76	15,98		102,50	103,40	106,13	100,13	
a	**Indikator Program Pengelolaan Energi Terbarukan**																			
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi	tCO2e				49.481	74.027	98.587	123.401		52.044,39	79.217,05	105.793,91	133.288,05		105,18	107,01	107,31	108,01	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Solo	tCO2e				218	256	294	332		118,48	227,44	465,52	646,37		54,35	88,84	158,34	194,69	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Muria	tCO2e				462,76	700,49	938,22	1.737,69		584,76	948,56	1.317,38	1.762,64		126,36	135,41	140,41	101,44	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Utara	tCO2e				189	227	545	583		245,54	582,77	863,51	1.034,47		129,92	256,73	158,44	177,44	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Selatan	tCO2e				161	714	726	739		216,9	481,33	565,33	756,42		134,72	67,41	77,87	102,36	

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	**Satuan**				**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Utara	tCO2e				57	83	383	408		173,33	224,29	288,65	424,73		304,09	270,23	75,37	104,10	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Ungaran Telomoyo	tCO2e				38,1	50,8	63,5	76,2		76,09	190,77	370,09	577,59		199,71	375,53	582,82	757,99	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Selatan	tCO2e				208	220	233	505		173,24	251,54	353,46	506,34		83,29	114,34	151,70	100,27	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Sewu Lawu	tCO2e				356	381	394	407		118,02	298,64	397,98	489,42		33,15	78,38	101,01	120,25	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Selatan	tCO2e				38.293	57.425	76.569	95.701		38.951,32	58.147,30	77.317,80	96.653,92		101,72	101,26	100,98	101	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Semarang Demak	tCO2e				8.141	12.190	16.239	20.288		9.839,99	14.828,52	19.770,81	24.471,22		120,87	121,64	121,75	121,62	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Merapi	tCO2e				873	1.194	1.515	1.836		1315,56	2075,27	2.860,45	3.676,39		150,69	173,81	188,81	200,24	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Tengah	tCO2e				38	51	64	76		178,36	713,44	748,89	927,25		469,37	1398,90	1170,14	1220,07	
B	**Indikator Sasaran**																			
	Rasio ketersediaan daya listrik	Angka				1	1	1	1		1,28	1,26	1,45	1,52		128	126	145	152	
b	**Indikator Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**																			

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin	%				15,91	22,98	30,06	37,13		18,95	26,08	37,2	50,89		119,11	113,49	123,75	137,06	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo	%				0,93	1,26	1,59	1,92		1,24	1,55	1,95	2,34		133,33	123,02	122,64	121,88	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria	%				1,11	1,59	2,06	2,53		1,5	2,11	2,96	3,82		135,14	132,70	143,69	150,99	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara	%				0,95	1,28	1,62	1,95		1,27	1,76	2,63	4,01		133,68	137,50	162,35	205,64	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan	%				1,88	2,64	3,39	4,15		2,16	2,93	3,96	5,23		114,89	110,98	116,81	126,02	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara	%				1,94	2,98	4,02	5,06		1,87	2,88	4,21	6,55		96,39	96,64	104,73	129,45	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo	%				0,84	1,1	1,36	1,62		1,21	1,46	1,83	2,19		144,05	132,73	134,56	135,19	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan	%				1,97	2,91	3,86	4,8		2,18	3,05	4,14	5,38		110,66	104,81	107,25	112,08	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga	%				0,9	1,21	1,51	1,82		1,29	1,59	2,04	2,49		143,33	131,40	135,10	136,81	

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	**Satuan**				**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	miskin Wilayah Sewu Lawu																			
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan	%				2,04	3,03	4,02	5,01		2,63	3,65	5,25	7,93		128,92	120,46	130,60	158,28	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak	%				0,69	1,07	1,45	1,82		0,79	1,17	1,47	1,96		114,49	109,35	101,38	107,69	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi	%				1,47	2,22	2,98	3,73		1,62	2,33	3,04	3,83		110,20	104,95	102,01	102,68	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah	%				1,18	1,7	2,21	2,73		1,2	1,7	3,73	5,17		101,69	100	168,78	189,38	
	Indikator Tujuan																			
	Nilai kepuasan masyarakat	%				87,46	88,34	89,22	90,11		84,28	88,62	89,25	90,75		96,36	100,32	100,03	100,71	
	Indikator Sasaran																			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka				75	77	79	80,5		78,16	79,79	82,97	84,9		104,21	103,62	105,03	105,47	

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi																			
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Indikator Sasaran																			
	Nilai kepuasan masyarakat	%				87,46	88,34	89,22	90,11		84,28	88,62	89,25	90,75		96,36	100,32	100,03	100,71	
	Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas ESDM	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Laboratorium	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran Telomoyo																			
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang Demak	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
B	**Renstra PD Tahun 2024 - 2026**																			
1	**Indikator Tujuan**																			
1.1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%								2,13					2,19					102,82
1.2	Indeks Pengelolaan Air Tanah	Angka								301					516					171,43
1.3	Indeks Ketahanan Energi	Angka								4,5					8,00					177,78
1.4	Indeks Reformasi Birokarasi	Angka								55					79,68					144,87
2	**Indikator Sasaran**																			

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.1	Persentase penerapan Good Mining Practice (GMP)	%								53					63,37					119,57
2.2	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka								3,60					3,65					101,39
2.3	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%								18,41					18,55					100,76
2.4	Tingkat Konsumsi Tenaga Listrik	kWh/ Kapita								768,10					802,39					104,46
2.5	Indeks Manajemen Risiko	Angka								3,00					3,10					103,33
2.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka								90,25					91,75					101,66
3	**Indikator Program**																			
3.1	Indikator Program Pengelolaan Mineral dan Batubara																			
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Wilayah Jawa Tengah	%								60					76,47					127,45
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Wilayah Solo	%								60					60,00					100
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Wilayah Kendeng Muria	%								60					68,34					113,90
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Wilayah Serayu Utara	%								60					62,35					103,92

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Wilayah Serayu Selatan	%								60					62,80					104,67
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Wilayah Slamet Utara	%								60					60,46					100,77
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Wilayah Ungaran Telomoyo	%								60					60,38					100,63
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Wilayah Kendeng Selatan	%								60					79,52					132,53
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Wilayah Sewu Lawu	%								60					61,34					102,23
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Wilayah Slamet Selatan	%								60					73,39					122,32
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Wilayah Semarang Demak	%								60					63,29					105,48
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Wilayah Merapi	%								60					62,18					103,63
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Wilayah Serayu Tengah	%								60					71,29					118,82
	Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara	%								100					100					100
3.2	Indikator Program Pengelolaan Aspek Kegeologian																			
	Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	%								27,5					27,40					100,37
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%								1,6					1,50					106,67

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%								3,4					3,16					107,59
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%								1,7					1,56					108,97
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%								2,2					1,95					112,82
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%								4,1					3,91					104,86
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%								1,8					1,53					117,65
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%								2,4					2,25					106,67
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%								1,6					1,45					110,34
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%								2,7					2,57					105,06
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%								2,9					2,84					102,11
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%								2,8					2,60					107,69
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%								1,6					1,48					108,11

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase pelayanan pengujian air tanah	%								100					100					100
3.3	Indikator Program Pengelolaan Energi baru Terbarukan																			
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Jawa Tengah	SBM								851.783					1.014.117,39					119,05
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Solo	SBM								379,28					41.915,22					1105,26
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Kendeng Muria	SBM								78.666,4					90.948,94					115,61
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Serayu Utara	SBM								130.273					132.503,59					101,71
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Serayu Selatan	SBM								275,25					289,74					105,26

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Slamet Utara	SBM								78.666,4					91.068,05					115,76
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Ungaran Telomoyo	SBM								118.669					108.392,42					91,34
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Kendeng Selatan	SBM								157.241					182.071,71					115,79
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Sewu lawu	SBM								78.666,4					41.516,02					52,77
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Slamet Selatan	SBM								157.064					151.285,79					96,32
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Semarang Demak	SBM								12.273,9					41.516,02					338,25

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Merapi	SBM								275,25					91.206,48					33135,87
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Serayu Tengah	SBM								39.333,2					41.403,35					105,26
3.4	Indikator Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																			
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan di Wilayah Jawa Tengah	%								63,81					65,51					102,66
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan di Wilayah Solo	%								49,7					49,81					100,22
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Muria	%								51,09					51,43					100,67
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan	%								49,97					50,10					100,26

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara																			
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan	%								49,36					49,44					100,16
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara	%								49,96					50,10					100,28
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo	%								49,95					50,17					100,44
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan	%								49,66					49,73					100,14
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu	%								49,57					49,66					100,18
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan	%								49,59					49,73					100,28
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan	%								51,86					52,24					100,73

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	ketenagalistrikan di Wilayah Semarang Demak																			
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan di Wilayah Merapi	%								49,64					49,88					100,48
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah	%								49,08					49,14					100,12
3.5	Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
3.5.1	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%								100					100					100
3.5.2	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan peranggkat daerah Dinas ESDM	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan peranggkat daerah Laboratorium	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan peranggkat daerah Cabang Dinas ESDM Wil. Solo	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan	%								100					100					100

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	keuangan peranggkat daerah Cabang Dinas ESDM Wil. Kendeng Muria																			
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan peranggkat daerah Cabang Dinas ESDM Wil. Serayu Utara	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan peranggkat daerah Cabang Dinas ESDM Wil. Serayu Selatan	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan peranggkat daerah Cabang Dinas ESDM Wil. Slamet Utara	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan peranggkat daerah Cabang Dinas ESDM Wil. Ungaran Telomoyo	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan peranggkat daerah Cabang Dinas ESDM Wil. Kendeng Selatan	%								100					100					100

No	RKPD		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan peranggkat daerah Cabang Dinas ESDM Wil. Sewu Lawu	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan peranggkat daerah Cabang Dinas ESDM Wil. Slamet Selatan	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan peranggkat daerah Cabang Dinas ESDM Wil. Semarang Demak	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan peranggkat daerah Cabang Dinas ESDM Wil. Merapi	%								100					100					100
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan peranggkat daerah Cabang Dinas ESDM Wil. Serayu Tengah	%								100					100					100

Berdasarkan Tabel 2.1., dalam capaian kinerja tujuan, sasaran, dan program sampai dengan Tahun 2024 terhadap target Renstra Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Tahun 2024 - 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan

   Capaian kinerja tujuan Dinas ESDM pada 2 (dua) Renstra sebelumnya terdapat perbedaan dimana pada periode Renstra tahun 2018 – 2023 diukur oleh 3 (tiga) indikator, yakni : Konsumsi listrik per kapita, Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, dan Nilai kepuasan masyarakat dengan hasil capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, ketiga indikator tersebut semuanya tercapai. Sedangkan pada periode Renstra tahun 2024 – 2026 terdapat 4 (empat) indikator tujuan, yaitu: Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB; Indeks Ketahanan Energi; Indeks Pengelolaan Air Tanah; dan Indeks Reformasi Birokrasi dengan hasil kinerja hingga tahun 2024, keempat indikator tersebut tercapai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya ketiga indikator tersebut adalah :

   - Faktor yang mempengaruhi tercapainya konsumsi listrik per kapita adalah meningkatnya populasi penduduk yang tentunya akan selaras dengan kebutuhan energi listrik dan juga meningkatnya pemerataan dan keterjangkauan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik. Meskipun demikian daya mampu kelistrikan Jawa Tengah pada Tahun 2024 sebesar 9.200 MW, sedangkan Kebutuhan 6.158 MW, sehingga Rasio Ketersediaan Daya Listrik mencapai 1,49 atau surplus 3.042 MW. Kondisi surplus tersebut disebabkan karena pemanfaatan energi listrik masih didominasi penggunaan listrik oleh sektor rumah tangga, sehingga perlu didorong penggunaan listrik produktif seperti optimalisasi kebutuhan penyediaan untuk sektor bisnis/industri.
   - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indeks pengelolaan air tanah adalah peningkatan kegiatan konservasi air tanah yang dilakukan oleh para pengguna air tanah. Terbitnya Permen ESDM no 14 Tahun 2024 yang mewajibkan para pengguna air tanah untuk membangun sumur resapan pada tiap sumur berdampak pada peningkatan penilaian indeks parameter konservasi air tanah. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dalam upaya memperketat pendayagunaan air tanah khususnya pada zona imbuhan, zona kritis dan zona rusak juga berdampak pada peningkatan penilaian indeks parameter pendayagunaan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa tengah telah memiliki regulasi tingkat provinsi tentang legalisasi zona konservasi air tanah kewenangan Pemerintah Provinsi (melalui Keputusan Gubernur No 544.29 tahun 2023) sebagai upaya pencegahan daya rusak air dan komitmen pemerintah dalam pengelolaan air tanah yang berkelanjutan dan berbasis konservasi.
   - Faktor yang mempengaruhi tercapainya indeks ketahanan energi adalah peningkatan pemanfaatan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil, peningkatan program efisiensi energi, pengelolaan infrastruktur energi yang lebih merata, perbaikan kualitas data energi di tingkat daerah dan penguatan regulasi / kebijakan yang mendukung ketahanan energi.

- Faktor yang mempengaruhi tercapainya kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB adalah dengan adanya kegiatan pertambangan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah pertambangan di Provinsi Jawa Tengah. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah, akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan lapangan kerja, terutama bagi penduduk sekitar, dan peningkatan penerimaan daerah.
- Faktor yang mempengaruhi tercapainya indeks reformasi birokrasi (RB) adalah enam area perubahan kunci, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Faktor yang mempengaruhi tercapainya nilai kepuasan masyarakat adalah penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana layanan publik, adanya produk spesifikasi jenis pelayanan, adanya persyaratan dan prosedur yang jelas dalam hal pelayanan, dan kompetensi dan perilaku pelaksana layanan publik yang baik.

2. Indikator Sasaran

Capaian kinerja Sasaran Dinas ESDM pada 2 (dua) Renstra sebelumnya terdapat perbedaan dimana pada periode Renstra tahun 2018 – 2023 diukur oleh 6 (enam) indikator, yakni : Rasio ketersediaan daya listrik, Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi, Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (%), Indeks ketersediaan air tanah, Nilai kepuasan masyarakat, dan Nilai SAKIP PD dengan hasil capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023, keenam indikator tersebut semuanya tercapai. Sedangkan pada periode Renstra tahun 2024 – 2026 terdapat penggunaan indikator baru yaitu persentase penerapan *Good Mining Practice*, tingkat konsumsi tenaga listrik, dan indeks manajemen risiko, dengan hasil capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 keseluruhannya tercapai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya keenam indikator tersebut adalah :

- Faktor yang mempengaruhi tercapainya rasio ketersediaan daya listrik adalah meningkatnya populasi penduduk yang tentunya akan selaras dengan kebutuhan energi listrik dan juga meningkatnya pemerataan dan keterjangkauan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik. Meskipun demikian daya mampu kelistrikan Jawa Tengah pada Tahun 2024 sebesar 9.200 MW, sedangkan Kebutuhan 6.158 MW, sehingga Rasio Ketersediaan Daya Listrik mencapai 1,49 atau surplus 3.042 MW. Kondisi surplus tersebut disebabkan karena pemanfaatan energi listrik masih didominasi penggunaan listrik oleh sektor rumah tangga, sehingga perlu didorong penggunaan listrik produktif seperti optimalisasi kebutuhan penyediaan untuk sektor bisnis/industri.
- Faktor yang mempengaruhi tercapainya persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi adalah pengembangan sarana prasarana EBT, pengembangan desa mandiri energi dengan potensi lokal, pemenuhan akses EBT bagi masyarakat, dan pemberian edukasi kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif. Hal lainnya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat serta kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan dan menjaga keberlanjutan infastruktur energi

terbarukan. Hingga akhir 2024, pemanfaatan EBT di Jawa Tengah telah mencapai 18,55% (dari target 18,41%) yang didominasi oleh pemanfaatan biomassa+kayu bakar 9,29%; biodiesel 7,36%; PLTA,PLTM, PLTMH 1,13%; dan PLTP 0,48%..

- Faktor yang mempengaruhi tercapainya persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan persentase penerapan *Good Mining Practice* adalah wilayah-wilayah yang memiliki potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masuk di dalam wilayah pertambangan dan terakomodir pada Perda RT RW Kab./Kota. Selain itu kegiatan perizinan kegiatan usaha pertambangan melalui pemberian rekomendasi teknis.

  Capaian indikator persentase penerapan *Good Mining Practice* pada Tahun 2024 sebesar 63,37 % (dari target 53%). Penerapan *Good Mining Practice* (GMP) ditujukan untuk terwujudnya peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung kebutuhan infrastruktur dan diharapkan juga pemenuhan kebutuhan pengembangan kawasan industri untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi
- Faktor yang mempengaruhi tercapainya indeks ketersediaan air tanah adalah kegiatan pengendalian pemanfaatan airtanah melalui pemberian rekomendasi teknis yang ketat terhadap permohonan izin pemanfaatan dan pengusahaan airtanah serta dalam pengawasannya, serta menggiatkan sosialisasi budaya hemat dalam penggunaan air. Pada tahun 2024 indikator ini tercapai tercapai pada angka 3,65 (di atas indeks minimum aman konservasi air tanah sebesar 1,67). Meskipun capaiannya masih berada di atas indeks aman, namun usaha konservasi dan pengendalian pemanfaatan air tanah tetap harus dilakukan. Penggunaan air permukaan tetap menjadi prioritas untuk mencukupi kebutuhan air baku.
- Faktor yang mempengaruhi tercapainya nilai kepuasan masyarakat adalah penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana layanan publik, adanya produk spesifikasi jenis pelayanan, adanya persyaratan dan prosedur yang jelas dalam hal pelayanan, dan kompetensi dan perilaku pelaksana layanan publik yang baik. Pada tahun 2024 capaian nilai kepuasan masyarakat adalah 91,75.
- Faktor yang mempengaruhi tercapainya Indeks Manajemen Risiko PD adalah penerapan identifikasi risiko dimulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dinas ESDM pada Tahun 2024 mendapatkan nilai Indeks Manajemen Risiko 3,10 yang berada di atas target capaian.

3. Indikator Program

Capaian kinerja program Dinas ESDM diukur oleh 69 (enam puluh sembilan) indikator yang terdapat pada 5 Program dan dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Capaian program ini diukur oleh 14 (empat belas) indikator dan dalam Renstra tahun 2018 – 2023 diarahkan pada pencapaian indikator persentase *good mining practice* (GMP) sedangkan Renstra tahun 2024 – 2026 diarahkan pada pencapaian tingkat produktivitas usaha pertambangan. Realisasi indikator kinerja sampai dengan akhir Tahun 2023 telah tercapai, yaitu sebesar 90,7% (tingkat capaian 108,82%). Nilai capaian indikator persentase *good mining practice* sebesar 90,7% ini secara umum merupakan akumulasi dari capaian indikator persentase *good mining practice* dari ke-12 wilayah cabang dinas ESDM. Hasil capaian kinerja program pada Renstra tahun 2024 – 2026 sampai dengan Tahun 2024, keempat belas indikator kinerja telah tercapai secara keseluruhan dengan hasil capaian 76,47% (tingkat capaian 127,45%).

Permasalahan yang dihadapi adalah masih terbatasnya metode pengukuran produksi atas kegiatan pertambangan sehingga mengakibatkan data produktivitas tidak menyajikan data yang akurat. Upaya yang dilakukan adalah mengukur data produksi dengan menggunakan alat drone sehingga dapat mengukur volume penambangan sesuai data time series. Manfaat dari program ini adalah mengetahui produktivitas kegiatan usaha pertambangan sehingga dapat menyajikan neraca kebutuhan dan produksi bahan galian

b. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Capaian program ini diukur oleh 14 (empat belas) indikator dan diarahkan pada pencapaian indikator persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 55,76% dan tahun 2024 sebesar 27,5%. Realisasi indikator ini sampai dengan akhir Tahun 2023, yaitu sebesar 43,64% (tingkat capaian 127,77%) dan 2024 sebesar 27,4% (tingkat capaian 100,37%). Guna pengendalian pengambilan airtanah tersebut, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mengendalikan pemanfaatan airtanah melalui pemberian rekomendasi teknis yang ketat terhadap permohonan izin pemanfaatan dan pengusahaan airtanah serta dalam pengawasannya, menggiatkan sosialisasi budaya hemat dalam penggunaan air.

Permasalahan yang dihadapi adalah tidak tersedianya data pemanfaatan air tanah secara *realtime*. Upaya yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan Badan Pendapatan Kab/Kota untuk mendapatkan data pajak air tanah dan volume pengambilan air tanah oleh perusahaan yang melakukan pengusahaan air tanah serta mendata pemakaian air rumah tangga yang didistribusikan oleh PDAM dan pemodelan pemanfaatan air tanah rumah tangga non PDAM sehingga diharapkan data yang diperoleh dapat merepresentasikan pemakaian air tanah secara real. Manfaat dari program ini adalah mengetahui pemanfaatan air tanah sehingga dapat

mengetahui kondisi kualitas dan kuantitas air tanah yang selanjutnya dapat dirumuskan upaya konservasi air tanah

c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Capaian program ini diukur oleh 13 (tiga belas) indikator dan diarahkan pada pencapaian indikator penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO_2e) di Jawa Tengah sebesar 123.938 tCO_2e. Realisasi indikator ini sampai dengan akhir Tahun 2023 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan nilai sebesar 133.288,05 tCO_2e (tingkat capaian 107,3 %). Nilai capaian indikator Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi di Jawa Tengah ini secara umum merupakan akumulasi dari capaian indikator Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi dari Bidang Energi Baru Terbarukan dan ke-12 wilayah cabang dinas ESDM. Pengukuran indikator Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi ini dalam rangka melaksanakan amanat Pergub 42/2012 tentang RAD GRK Jateng 2010-2020, yaitu untuk melaksanakan rencana aksi penurunan emisi GRK sektor energi melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan melakukan konservasi energi.

Sedangkan pada Renstra tahun 2024 – 2026 capaian kinerja diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di wilayah Jawa Tengah. Hingga tahun 2024 tercatat 851.783 SBM menjadi target dan telah tercapai sebesar 1.014.117,39 SBM (tingkat capaian 119,05%). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi.

Permasalahan dalam program ini adalah masih terbatasnya pembangunan infrastruktur EBT oleh pihak swasta maupun masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan pembangunan infrastruktur EBT melalui pendanaan APBD yang ditujukan kepada masyarakat langsung maupun koperasi dan pondok pesantren. Manfaat dari program ini adalah meningkatkan bauran EBT dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan dan lebih murah dalam operasionalnya. Serta melakukan promosi potensi EBT di Jawa Tengah kepada investor dan melaksanakan sosialisasi energi terbarukan hingga level Pemerintah Desa

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Capaian program ini diukur oleh 13 (tiga belas) indikator. Renstra tahun 2018 - 2023 diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin di Jawa Tengah pada tahun 2023 memiliki target sebesar 37,13%. Realisasi indikator ini sampai dengan akhir Tahun 2023 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan nilai sebesar 50,89% (tingkat capaian 137,06%). Nilai capaian indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin di Jawa Tengah sebesar 37,2% ini merupakan akumulasi dari capaian indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin dari ke-12 wilayah cabang Dinas ESDM yang realisasi capaian seluruhnya juga telah melebihi targetnya. Pada tahun 2023 dari

target volume 15.000 sambungan, tercapai 28.937 sambungan, yang terdiri dari 12.536 sambungan terpasang melalui APBD Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah, 16.401 sambungan terpasang melalui APBN dari Program Kementerian ESDM berupa Bantuan Pasang Baru Listrik, dan CSR dari PT. PLN. Meskipun realisasi tercapai dan melebihi target, akan tetapi capaian dari APBD hanya mencapai 12.536 sambungan. Hal tersebut disebabkan adanya kendala di lapangan pada pelaksanaan pekerjaan pemasangan sambungan listrik di 12 Wilayah Cabang Dinas ESDM.

Permasalahan yang terjadi adalah pada pelaksanaan kegiatan sambungan listrik rumah yang dilaksanakan melalui pendanaan APBD terdapat jeda waktu yang lama antara perencanaan dengan pelaksanaan sehingga terjadi perubahan kondisi di lapangan serta terdapat updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mengakibatkan beberapa sasaran tidak tersalurkan. Untuk mengatasi hal tersebut pada tahun anggaran perubahan telah dilakukan penyesuaian terhadap calon penerima bantuan sambungan listrik melalui pendanaan APBD. Selain itu, telah dilakukan serangkaian koordinasi pelaksanaan kegiatan sambungan listrik murah dengan pendanaan dari APBN maupun CSR. Manfaat dari program ini adalah penyediaan akses listrik untuk masyarakat yang belum memiliki akses listrik. Selain itu untuk mendukung program rasio elektrifikasi yang saat ini di Jawa Tengah mencapai 99,90% (data PT. PLN).

Adapun upaya penyelesaian masalah yang telah dilakukan, yaitu:

- Koordinasi dengan PLN melalui ULP setempat untuk sinkronisasi data;
- Koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan verifikasi agar tingkat efektivitas program meningkat;
- Koordinasi dengan pelaksana dan melaksanakan pengawasan kegiatan dan stakeholder lainnya untukkolaborasi pendanaan program.

Renstra Dinas ESDM tahun 2024 – 2026 diarahkan pada pencapaian indikator persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan di Jawa Tengah pada tahun 2024 memiliki target sebesar 63,81%. Realisasi indikator ini sampai dengan akhir Tahun 2024 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan nilai sebesar 65,51% (tingkat capaian 102,66%). Nilai capaian indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin di Jawa Tengah sebesar 65,51% ini merupakan akumulasi dari capaian indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin dari ke-12 wilayah cabang Dinas ESDM yang realisasi capaian seluruhnya juga telah sesuai targetnya. Tercatat penerima manfaat sambungan listrik rumah untuk masyarakat tidak mampu sejumlah 27.977 sambungan rumah. Pada sambungan listrik rumah untuk masyarakat tidak mampu, selain melalui pendanaan APBD kegiatan ini juga dilakukan melalui pendanaan APBN oleh Kementerian ESDM RI dan CSR dari swasta dengan rinci 8.728 SR dari APBD dan 19.249 SR dari pendanaan kolaborasi.

Permasalahan yang terjadi adalah masih terdapat sambungan listrik pada rumah tangga yang belum memenuhi aspek keselamatan (K2 Ketenagalistrikan). Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan intervensi melalui kegiatan pemasangan sambungan listrik untuk rumah tangga miskin yang telah memenuhi aspek K2 karena dalam prosesnya telah memiliki sertifikat laik operasi (SLO) yang artinya jaringan telah memenuhi standar keselamatan. Manfaat dari program ini adalah untuk meningkatkan K2 Ketenagalistrikan sehingga meminimalkan kecelakaan akibat dari sambungan listrik maupun dari pembangkit dengan daya kecil-menengah.

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Capaian program ini diukur oleh 15 (lima belas) indikator dan diarahkan pada pencapaian indikator Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD dan Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah yang ada pada urusan kesekretariatan, baik di Dinas (Pusat), 12 Cabang Dinas, UPT Laboratorium. Hasil capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022, kelima belas indikator tersebut semuanya tercapai.

Lebih lanjut kinerja anggaran yang dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

No.	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendapatan	-	-	-	-	-	2.064.842.000	2.003.561.000	2.516.177.000	3.155.429.000	3.301.429.000
2	Belanja	110.598.159.000	106.440.722.000	111.740.510.000	113.855.957.000	101.930.227.000	69.862.081.000	75.708.687.000	93.654.074.000	98.259.476.000	87.025.147.000
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pendapatan	2.082.230.000	2.084.868.000	2.318.733.000	3.136.862.000	3.367.147.925	100,84	104,06	92,15	99,41	101,99	11,97	12,34
2	Belanja	67.086.243.774	71.157.392.372	87.676.094.165	94.828.888.755	85.854.378.107	96,03	93,99	93,62	96,51	98,65	4,91	5,59
3	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

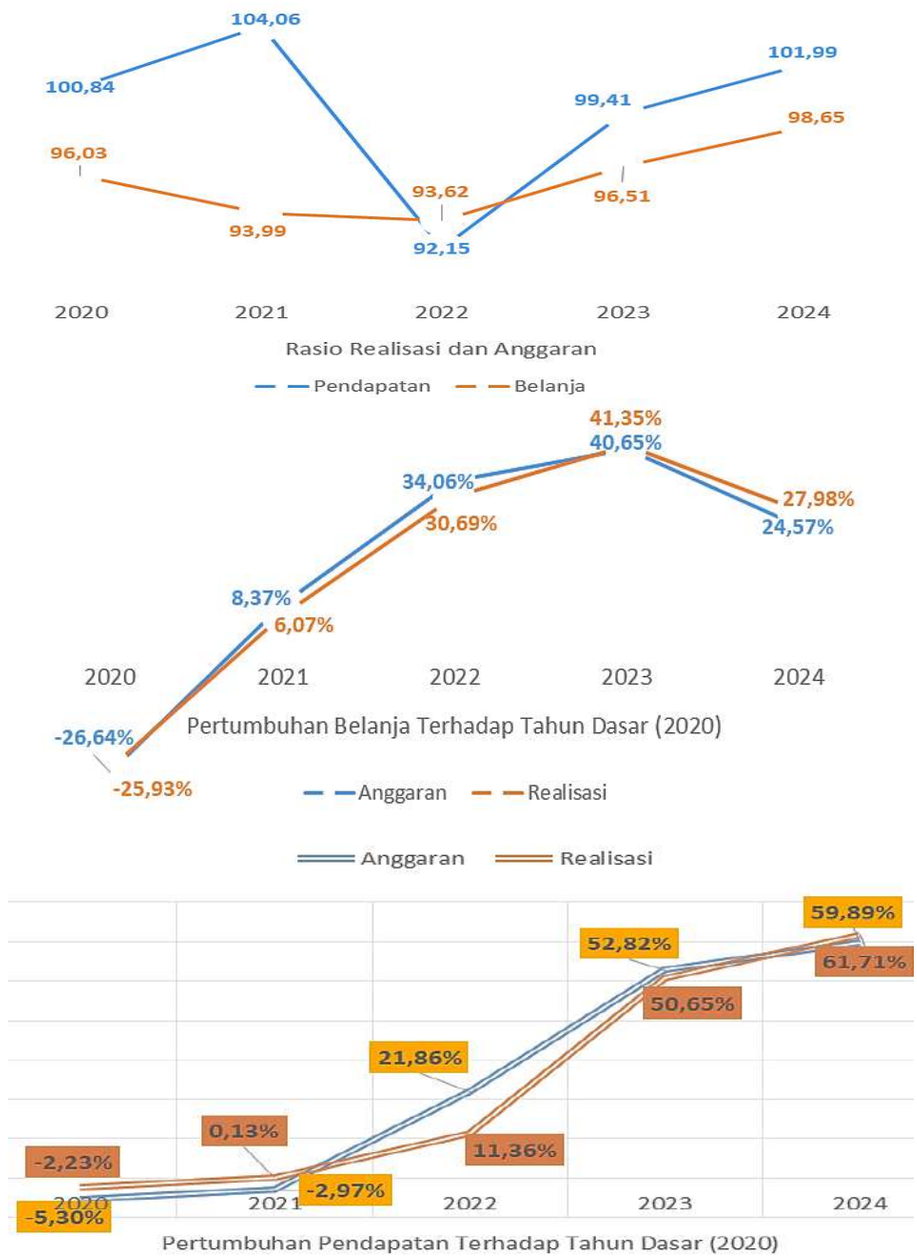

Gambar 2.7. Grafik Rasio Realisasi, Tingkat Pertumbuhan Belanja, dan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan 2020-2024

Pada Gambar 2.7., menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran selama Tahun 2020 - 2024 masih termasuk dalam tingkat pencapaian efektif, dengan tingkat pencapaian antara 90% - 100% (berdasarkan kategori tingkatan efektivitas, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996).

Meskipun demikian, rasio antara realisasi dan anggaran pada Tahun 2021 penyerapan anggaran paling rendah sebesar 93,99%, sehingga menimbulkan SILPA sebesar 6,01%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Silpa dari gaji dan tunjangan pegawai Dinas ESDM dipengaruhi adanya sejumlah 5 pegawai yang mengalami mutasi dan 9 pegawai yang purna tugas dan akres;

b. Efisiensi pembayaran rekening listrik/air/telepon/internet pada kantor pusat dan cabang dinas ESDM;
c. Efisiensi uang transport, tiket dan penginapan serta perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah;
d. Pengembalian anggaran yang disesuaikan dengan prestasi pekerjaan pada sambungan listrik murah dengan pagu anggaran Rp. 12.425.710.000 terserap sebesar Rp. 9.893.250.970 (79,61%) dengan capaian realisasi 12.368 SR (82,45%);
e. Sisa kontrak pembangunan infrastruktur EBT seperti pembangunan digester biogas, instalasi perpiapaan gas rawa, pembangunan PLTMH, revitalisasi PLTMH dengan pagu anggaran Rp. 10.688.018.000 terserap sebesar Rp. 10.357.896.954 (96,91%);
f. Tidak terlaksananya kegiatan penyusunan rekomendasi teknis izin usaha pertambangan dan kegiatan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan pada 12 Cabang Dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 256.967.000 terserap sebesar Rp. 82.442.800 (32,08%) disebabkan belum turunnya Perpres turunan UU No. 3 Tahun 2020 terkait pendelegasian kewenangan pengelolaan minerba dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Penyerapan anggaran sektor minerba digunakan dalam rangka kegiatan penertiban PETI.

Pertumbuhan realisasi pendapatan pada Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan positif sebesar 12,34%, meskipun pada Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar -2,23%. Tingkat Pertumbuhan realiasi pendapatan terhadap tahun dasar (2020) yang terjadi selama periode Tahun Anggaran 2020-2024, yaitu sebesar -2,23%; 0,13%; 11,36%; dan 50,65%; 61,71%. Apabila dibandingkan dengan kondisi 3 tahun terakhir, realisasi penerimaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung seperti penambahan layanan pada laboratorium air dan geomekanika, peningkatan metode pengawasan dan rekonsiliasi produksi pada retribusi produksi feldspar oleh PT. SMP dan jenis layanan baru berupa pemakaian alat drone dan camera hole.

Pertumbuhan realisasi belanja pada Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi belanja positif sebesar 5,59%, meskipun pada Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar -25,93%. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran pada APBD Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 dan hal tersebut juga terjadi pada APBD Tahun 2021, namun APBD Tahun 2021 masih di atas dari APBD Tahun 2020. Tingkat Pertumbuhan realiasi belanja terhadap tahun dasar (2020) yang terjadi selama periode Tahun Anggaran 2020-2024, yaitu sebesar -25,93%; 6,07%; 30,69%; 41,35% dan 27,98%. Mendasari tren historis 5 (lima) tahun terakhir tren realisasi belanja Dinas ESDM Prov. Jateng mengalami peningkatan namun terdapat kondisi penurunan signifikan dalam realisasi belanja pada tahun 2024 dikarenakan anggaran yang berada dibawah pagu Renstra 2024 – 2026. Kondisi ini memiliki konsekuensi adanya penyesuaian target dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, tentu tetap mendahulukan dalam optimalisasi kinerja dan kemaslahatan masyarakat.

2.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Utama Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	Masih banyaknya penambangan tanpa izin (PETI)	a. Terdapatnya potensi bahan galian pada suatu wilayah yang belum ditetapkan dalam kawasan peruntukan pertambangan di Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota. b. Perlunya peningkatan komitmen dan sinergi antar instansi terkait dalam hal pengendalian pengelolaan pertambangan.
		Belum optimalnya kualitas sistem pelayanan dan proses perizinan pada sektor Minerba	a. Sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap proses perizinan perlu ditingkatkan. b. Belum optimalnya sistem pelayanan perizinan melalui OSS c. Tata Ruang Nasional dan Provinsi tidak sinkron

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dengan Tata Ruang Kabupaten/Kota
		Belum optimalnya penerapan *Good Mining Practice*	a. Masih rendahnya pemahaman penerapan kaidah pertambangan yang baik/*Good Mining Practice* (GMP) oleh para pelaku usaha pertambangan. b. Ketidakselarasan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk masyarakat sekitar tambang c. Rendahnya produktivitas pertambangan d. Eksploitasi bahan galian yang belum diikuti dengan pemulihan lingkungan
		Belum optimalnya data dukung potensi dan ketersediaan bahan tambang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur	a. Data pemetaan potensi bahan tambang masih minim. b. Terbatasnya bahan tambang dari yang berizin untuk pembangunan infrastruktur c. Ketidakselarasan harga jual bahan galian dengan Harga Pokok Mineral
2.	Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah	Masih banyaknya daerah rawan kekeringan di Jawa Tengah	a. Banyak wilayah rawan kering secara hidrogeologi di Jawa Tengah. b. Penyediaan sumber air permukaan yang layak untuk kebutuhan masyarakat masih kurang.
		Masih banyaknya pelaku pengusahaan air tanah yang belum mengajukan izin	Rendahnya kesadaran pelaku pengusahaan air tanah mengajukan izin
		Belum optimalnya upaya konservasi air tanah	a. Rendahnya pemahaman pemanfaat air tanah terhadap konservasi air tanah b. Eksploitasi airtanah masih tinggi. c. Rendahnya kesadaran pelaku pengusahaan air

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			tanah terhadap aturan yang berlaku d. Tidak terdapat dasar hukum yang mengatur zona konservasi sebagai pedoman dalam konservasi air tanah e. Perhitungan Indeks Ketersediaan Air Tanah tidak menunjukkan representasi akurat dari kondisi lapangan.
		Belum optimalnya kualitas sistem pelayanan dan proses perizinan kegiatan pengusahaan air tanah	a. Ketidaksesuaian perhitungan keekonomian bagi pelaku usaha skala kecil b. Ketidaksesuaian kebutuhan debit air yang diajukan pada dokumen lingkungan dengan pengajuan pengusahaan air tanahnya c. Kebutuhan air perusahaan dengan risiko rendah tidak teridentifikasi secara tepat d. Tidak terdapat petunjuk teknis pembangunan sumur resapan pada persyaratan izin pengeboran e. Tidak terdapat petunjuk teknis pembangunan sumur pantau pada persyaratan izin pengeboran f. Tingginya perizinan air tanah yang belum melengkapi tahapan persyaratan teknis g. Tidak sinkronnya persyaratan perizinan berusaha antara regulasi yang baru dengan sistem perizinan h. Terbatasnya data dalam penentuan kedalaman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			yang direkomendasikan pada permohonan izin air tanah i. Tidak terdapat SOP terkait sumur terbangun j. Belum optimalnya sistem OSS pada perizinan pengusahaan air tanah
		Banyaknya limbah/ buangan industri dan rumah tangga yang polutif	a. Limbah industrialisasi Tidak dikelola dengan baik b. Tingginya rumah tangga yang tidak mengelola limbahnya
		Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Menurunnya ketersediaan lahan hijau/ hutan akibat meningkatnya pembangunan perumahan
3.	Belum optimalnya upaya konservasi energi di Jawa Tengah	Belum optimalnya pengelolaan energi yang efisien	a. Belum optimalnya pelaksanaan audit energi di seluruh sektor b. Ketidakselarasan pemenuhan standar konservasi energi c. Rendahnya penggunaan teknologi hemat energi d. Terbatasnya pemanfaatan sistem monitoring digital berbasis teknologi informasi untuk mendukung evaluasi dan efektivitas program konservasi energi secara berkelanjutan
		Masih rendahnya pemahaman tentang konservasi energi	a. Rendahnya budaya hemat energi b. Terbatasnya penerapan metode sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik tentang konservasi energi c. Terbatasnya kemitraan dengan sektor swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam mendukung inovasi untuk

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			penerapan praktik terbaik konservasi energi
4.	Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang berkelanjutan	Masih banyak potensi EBT yang belum dimaksimalkan	a. Pengembangan teknologi EBT tidak selaras dengan potensi energi yang tersedia b. Terbatasnya data potensi EBT secara *up to date* c. Ketidakselarasan perencanaan dan implementasi program transisi energi yang terintegrasi antar sektor
		Masih tingginya pemakaian energi fosil	a. Tingginya ketergantungan masyarakat dengan energi fosil b. Tingginya ketergantungan sektor industri dengan energi fosil c. Konsumsi energi fosil tidak terhambat oleh keterbatasan akses
		Biaya investasi yang tinggi untuk pengembangan EBT	a. Rendahnya ketertarikan investor swasta di bidang EBT b. Belum optimalnya implementasi skema pemberian insentif dan kemudahan usaha bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai sarana stimulan bisnis pengembangan EBT
		Masih banyak data pembangunan infrastruktur EBT yang belum terdata	Terbatasnya data pembangunan infrastruktur EBT secara *up to date*
		Asas kemanfaatan EBT tidak berlangsung lama	a. Tingginya tingkat infrastruktur EBT terbangun yang tidak terutilisasi secara berkelanjutan b. Ketidakmerataan sebaran infrastruktur energi baru

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			terbarukan, khususnya di wilayah terpencil dan pedesaan, guna memastikan inklusivitas transisi energi c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara dan menjaga keberlanjutan infrastruktur EBT, kelembagaan pengelola infrastruktur EBT belum berjalan optimal
5.	Pertumbuhan konsumsi (*demand*) tenaga listrik di Jawa Tengah masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penyediaan tenaga listrik	Rendahnya produktivitas dan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan energi listrik	a. Tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum tersambung listrik b. Rendahnya pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat c. Ketidakmerataan distribusi energi listrik
		Belum optimalnya kualitas sistem pelayanan dan proses perizinan pada sektor Ketenagalistrikan	a. Belum optimalnya sistem OSS dalam perizinan ketenagalistrikan b. Ketidakselarasan kewenangan antar lembaga
		Belum optimalnya penyelenggaraan Ketenagalistrikan dalam memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan	a. Rendahnya kepatuhan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan b. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalitrikan c. Belum menyeluruhnya pemasangan instalasi tenaga listrik yang memenuhi kaidah-kaidah pemasangan instalasi sesuai ketentuan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			d. Belum menyeluruhnya pemasangan instalasi listrik sesuai standar e. Rendahnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha ketenagalistrikan
		Belum optimalnya keandalan dan mutu sistem suplai tenaga listrik	Terdapat gangguan penyaluran tenaga listrik terhadap konsumen
6.	Belum optimalnya layanan dan tata kelola pemerintahan yang dinamis	Belum optimalnya implementasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan	Terbatasnya sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi
		Belum optimalnya manajemen organisasi berbasis risiko	a. Masih rendahnya komitmen pegawai dalam menerapkan manajemen risiko b. Tingkat kompetensi pegawai yang rendah dalam hal manajemen risiko
		Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	a. Tingkat kompetensi pegawai yang perlu ditingkatkan sebagai pelayan publik b. Ketidakmerataan fasilitas sarana prasarana pelayanan publik yang baik c. Implementasi sistem informasi pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.

Berbagai kondisi *Internal* dan *Eksternal* yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Kondisi *eksternal* tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Sedangkan kondisi internal tersebut dapat merupakan suatu kekuatan maupun kelemahan yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang.

2.5. Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,

mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Isu-isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya, dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah melakukan perencanaan, realisasi, dan pengawasan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah, khususnya di OPD, dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional maupun sektoral. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah di OPD dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis, baik pada skala nasional maupun regional. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah di OPD dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan, baik tingkat nasional maupun regional.

Tabel 3.2. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Wilayah potensial dengan komoditas pertambangan di Jawa Tengah guna mendukung percepatan pengelolaan infrastruktur dengan penekanan pada pengelolaan pertambangan yang baik dan optimalisasi pendapatan daerah.	Belum optimalnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	Produktivitas dan daya saing sektor industri dan pariwisata relatif masih rendah	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8)	Perbaikan tata kelola pertambangan	Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Transformasi tata kelola pertambangan menuju Implementasi *Good mining practice*
Pengelolaan sumber daya air tanah dengan pendekatan pada konservasi air tanah dan pengembangan geopark.	Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah	Ancaman keberlanjutan sumber daya air dan hutan	Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan (SDG 6)	Konservasi Sumber Daya Air (PN.2.14)	Peningkatan daya dukung dan daya tampung di Jawa Tengah	Pengelolaan sumber daya air tanah dan geologi yang berkelanjutan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Pembinaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah dan sektor lainnya.	Belum optimalnya upaya konservasi energi di Jawa Tengah	Belum optimalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua (SDG 7)	Penguatan lmplcmentasi Transisi Energi Berkeadilan (PN.2.13)	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan di Jawa Tengah	Pengarusutamaan Konservasi energi di Jawa Tengah
Pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, biomassa, biogas dan sumber lainnya dalam wilayah provinsi.	Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang berkelanjutan	Peningkatan ancaman bencana dan ancaman perubahan iklim	Mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim (SDG 13)	Perluasan Akscs dan Jangkauan Pelayanan Energi (PN.2.12)	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan di Jawa Tengah	Optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi
Pembinaan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum	Pertumbuhan konsumsi (*demand*) tenaga listrik di Jawa Tengah masih	Belum optimalnya pengurangan kemiskinan	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8)	Pembangunan lnfrastruktur Jaringan Ketcnagalistrikan	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan	Konsumsi listrik per kapita Jawa Tengah yang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
dan penyediaaan tenaga listrik untuk masyarakat.	lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penyediaan tenaga listrik	dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif		dan Digitalisasinya (PN.3.27)	ramah lingkungan di Jawa Tengah	berkualitas dan berdayaguna

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang disertai indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan

a. Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi dan merupakan *ultimate outcome* dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan.

Adapun tujuan yang ditetapkan sebagai langkah pemfokusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis.

Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ke-1 sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah ke-2 “Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing dan Inklusif, dan Berkelanjutan” dan Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ke-2 sebagaiman dimaksud untuk mendukung sasaran daerah ke-1 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis.

b. Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan”, terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan air tanah;
2. Meningkatnya penerapan *Good Mining Practice* (GMP);
3. Meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer; dan
4. Terjaganya ketersediaan daya listrik.

Sedangkan untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis”, sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.

Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam bentuk *cascading* dapat dilihat pada Gambar 3.1.

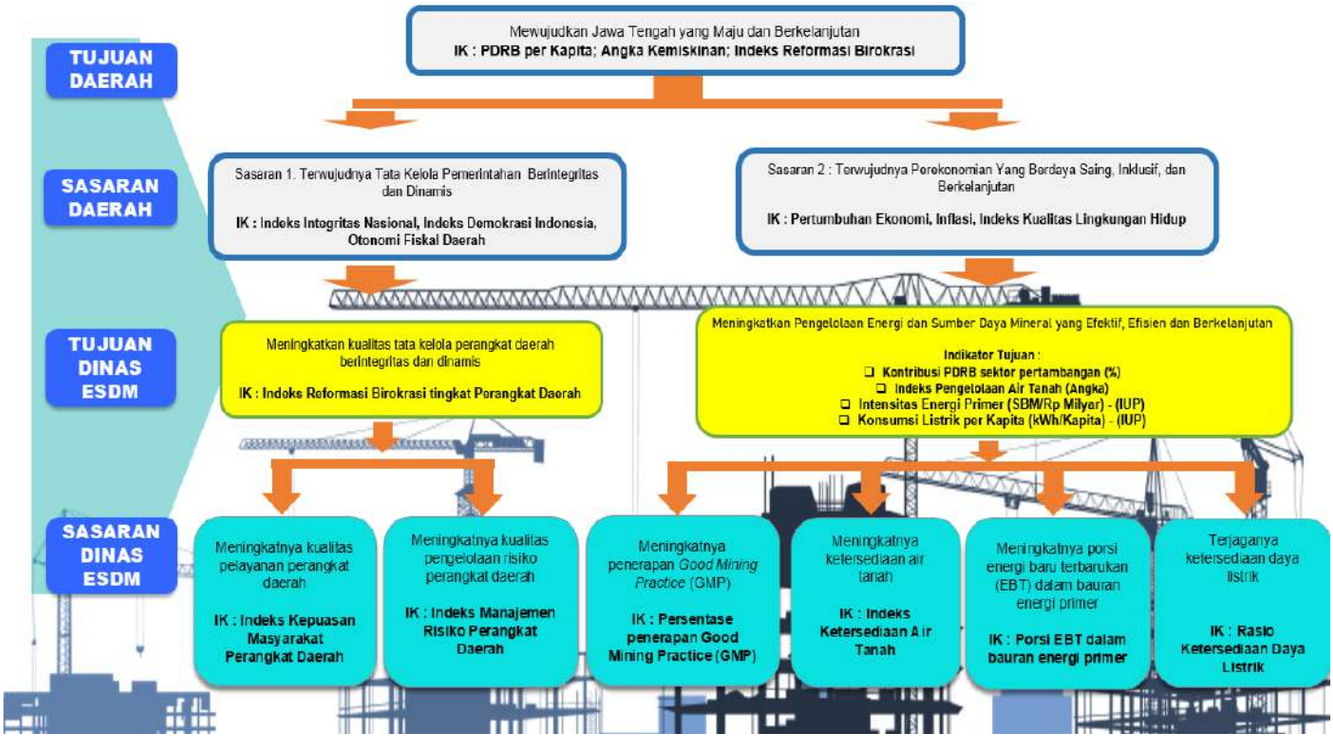

Gambar 3.1. Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Adapun Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	*Baseline* Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan		Indeks Pengelolaan Air Tanah	Angka	n.a	516	351	360	365	370	375	380	380
		Meningkatnya Ketersediaan Air Tanah	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3,76	3,65	3,66	3,67	3,68	3,69	3,7	3,71	3,71
			Kontribusi PDRB sektor pertambangan	%	2,24	2,19	2	2,01	2,02	2,03	2,04	2,05	2,05
		Meningkatnya Penerapan *Good Mining Practice* (GMP)	Persentase Penerapan *Good Mining Practice* (GMP)	%	89,79	63,37	63,4	63,5	63,6	63,7	63,8	63,9	63,9
			Intensitas Energi Primer	SBM/ Milliar (Rp)	n.a	n.a	212,71	203,21	192,72	182,5	172,56	162,86	162,86
		Meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	15,98	18,55	21,32	21,6	21,87	22,17	22,38	22,55	22,55
			Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/Kapita	1103,75	802,05	826,11	883,94	945,82	1.040,4	1.169	1.250,83	1.250,83
		Terjaganya ketersediaan daya listrik	Rasio Ketersediaan daya Listrik	Angka	1,52	1,494	1	1	1	1	1	1	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	*Baseline* Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas ESDM		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas ESDM	Angka	76,29	79,68	79,70	79,71	79,72	79,73	79,74	79,75	79,75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas ESDM	Indeks Kepuasaan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas ESDM	Angka	90,75	90,5	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90	90
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas ESDM	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas ESDM	Angka	3,018	3,1	3,05	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	3,15

Keterangan :

1) jika tertulis n.a. artinya indikator tersebut merupakan indikator baru yang tidak digunakan dalam RPD Tahun 2024-2026;

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai yang berisikan langkah-langkah program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertambangan melalui optimalisasi penerapan *good mining practice* (GMP);
2. Meningkatkan ketahanan energi dengan mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan yang terjangkau, inklusif, serta memperkuat edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan;
3. Meningkatkan konservasi energi melalui pengelolaan energi yang efisien di seluruh sektor serta memperkuat kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam praktik hemat energi secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan ketahanan energi melalui terjaganya keseimbangan kapasitas dan permintaan energi listrik yang inklusif, merata, dan terpenuhinya keselamatan ketenagalistrikan.
5. Meningkatkan pengelolaan air tanah dan sumber daya geologi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah melalui identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah melalui peningkatan kemampuan pegawai sebagai sebagai pelayan publik dan sistem pelayanan publik.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program serta membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Arah Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral merujuk pada arah kebijakan pembangunan energi dan sumber daya mineral yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam menjabarkan sasaran daerah, Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi. Arah kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan	Meningkatnya penerapan *Good Mining Practice* (GMP)	Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertambangan melalui optimalisasi penerapan *Good Mining Practice* (GMP)	1. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan; 2. Peningkatan penerapan *Good Mining Practice* pada kegiatan usaha pertambangan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 3. Penguatan Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah; 4. Peningkatan tertib usaha pertambangan; 5. Peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer	1. Meningkatkan ketahanan energi dengan mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan yang terjangkau, inklusif, serta memperkuat edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan; 2. Meningkatkan konservasi energi melalui pengelolaan energi yang efisien di seluruh sektor serta memperkuat kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam praktik hemat energi secara berkelanjutan.	1. Penguatan sinergi perencanaan dan implementasi program transisi energi yang terintegrasi antar sektor di wilayah Jawa Tengah. 2. Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan secara menyeluruh lintas sektor seperti lembaga pendidikan pesantren, UMKM, lembaga berbadan hukum dan lembaga masyarakat non badan hukum lainnya, yang dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 3. Perluasan edukasi, sosialisasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi baru terbarukan, melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			komunitas lokal, serta swasta. 4. Pemetaan potensi energi baru terbarukan serta memperkuat regulasi yang mendukung akselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan di Jawa Tengah. 5. Optimalisasi pemanfaatan potensi energi baru terbarukan sebagai solusi energi alternatif di tingkat desa, dengan mendorong kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara maksimal serta pemberian insentif dan kemudahan regulasi bagi pelaku usaha dan masyarakat. 6. Mengembangkan infrastruktur energi baru terbarukan secara merata, khususnya di wilayah terpencil dan pedesaan, guna memastikan inklusivitas transisi energi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			7. Meningkatkan konservasi energi melalui pengelolaan energi yang efisien di seluruh sektor serta memperkuat kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam praktik hemat energi secara berkelanjutan. 8. Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik secara intensif untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku hemat energi di masyarakat. 9. Pelaksanaan audit energi secara berkala pada sektor industri, transportasi, bangunan, dan fasilitas umum untuk memastikan efisiensi pemakaian energi. 10. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam mendukung inovasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			untuk penerapan praktik terbaik konservasi energi.
	Terjaganya ketersediaan daya listrik	Meningkatkan ketahanan energi melalui terjaganya keseimbangan kapasitas dan permintaan energi listrik yang inklusif, merata, dan terpenuhinya keselamatan ketenagalistrikan	1. Perluasan dan pemenuhan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik; 2. Peningkatan konsumsi energi listrik per kapita melalui optimalisasi penggunaan energi listrik produktif; 3. Peningkatan keselamatan ketenagalistrikan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan.
	Meningkatnya ketersediaan air tanah	Meningkatkan pengelolaan air tanah dan sumber daya geologi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	1. Peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada zona konservasi cekungan air tanah; 2. Meningkatkan indeks pengelolaan air tanah terutama pada pengguna air tanah dengan pemanfaatan skala besar di Jawa Tengah 3. Melakukan sosialisasi pengelolaan air tanah yang baik kepada

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengguna air tanah di Jawa Tengah 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh pengguna air tanah di Jawa Tengah; 5. Melakukan pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah di Jawa Tengah bersama dengan Kabupaten/ Kota; 6. Meningkatkan sinkronisasi data penggunaan air tanah di Jawa Tengah baik yang digunakan untuk kebutuhan air bersih masyarakat, irigasi, maupun usaha/ industri; 7. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam mendukung inovasi untuk penerapan praktik terbaik dalam upaya konservasi air tanah; 8. Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik secara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			intensif untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku hemat air khususnya air tanah; 9. Melakukan pengembangan geoheritage dengan peningkatan kapasitas SDM, penguatan mitra dan stakeholder di wilayah geopark di Jawa Tengah; 10. Melakukan monitoring *land subsidence* di pesisir utara Jawa Tengah; 11. Peningkatan pelayanan informasi geologi untuk mitigasi kejadian geologi dan pengembangan wilayah.
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah melalui identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian	1. Penguatan komitmen dalam meningkatkan nilai-nilai kedisiplinan mengenai hak dan kewajiban PNS; 2. Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN; 3. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4. Penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT; 5. Penguatan pengawasan dan pengendalian sesuai tujuan dan risiko.
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah melalui peningkatan kemampuan pegawai sebagai pelayan publik dan sistem pelayanan publik	1. Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN; 2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik; 3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik; 4. Peningkatan pengelolaan informasi yang kompetitif; 5. Peningkatan pengelolaan data dan informasi melalui manajemen yang baik; 6. Penguatan tim dalam rangka mendukung tingkat organisasi maupun pelayanan publik.

Selain itu, disajikan pentahapan pembangunan yang dimaksudkan untuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Prioritas dalam setiap tahapan didasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan. Adapun pentahapan tersebut disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Penguatan transformasi tata kelola pertambangan berwawasan lingkungan dan penerapan *Good Mining Practice.*	1. Peningkatan transformasi tata kelola pertambangan berwawasan lingkungan dan penerapan *Good Mining Practice.*	1. Optimalisasi transformasi tata kelola pertambangan berwawasan lingkungan dan penerapan *Good Mining Practice.*	1. Pemantapan transformasi tata kelola pertambangan berwawasan lingkungan dan penerapan *Good Mining Practice.*	1. Perwujudan transformasi tata kelola pertambangan berwawasan lingkungan dan penerapan *Good Mining Practice.*
2. Penguatan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (utamanya mendukung produktivitas pertanian) dan konservasi energi melalui pengelolaan energi yang efisien.	2. Peningkatan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (utamanya mendukung kawasan pariwisata) dan konservasi energi melalui pengelolaan energi yang efisien.	2. Akselerasi pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (utamanya mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan industri hijau) dan konservasi energi melalui pengelolaan energi yang efisien.	2. Pemantapan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan dan konservasi energi melalui pengelolaan energi yang efisien.	2. Perwujudan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan dan konservasi energi melalui pengelolaan energi yang efisien.
3. Penguatan konsumsi energi listrik per kapita dan pemenuhan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik.	3. Peningkatan konsumsi energi listrik per kapita dan pemenuhan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik.	3. Percepatan konsumsi energi listrik per kapita dan pemenuhan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik.	3. Pemantapan konsumsi energi listrik per kapita dan pemenuhan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik.	3. Perwujudan konsumsi energi listrik per kapita dan pemenuhan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
4. Penguatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis konservasi.	4. Peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis konservasi.	4. Percepatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis konservasi.	4. Pemantapan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis konservasi.	4. Perwujudan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis konservasi.
5. Pengembangan kualitas pelayanan perangkat daerah melalui peningkatan kemampuan pegawai sebagai pelayan publik dan sistem pelayanan publik	5. Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah melalui peningkatan kemampuan pegawai sebagai pelayan publik dan sistem pelayanan publik	5. Percepatan kualitas pelayanan perangkat daerah melalui peningkatan kemampuan pegawai sebagai pelayan publik dan sistem pelayanan publik yang integratif	5. Penguatan kualitas pelayanan perangkat daerah melalui peningkatan kemampuan pegawai sebagai pelayan publik dan sistem pelayanan publik yang cepat tanggap	5. Perwujudan kualitas pelayanan perangkat daerah melalui peningkatan kemampuan pegawai sebagai pelayan publik dan sistem pelayanan publik berkualitas prima
6. Pengembangan manajemen organisasi berbasis risiko dan pengendalian sesuai tujuan Perangkat Daerah	6. Peningkatan manajemen organisasi berbasis risiko dan pengendalian sesuai tujuan Perangkat Daerah	6. Percepatan manajemen organisasi berbasis risiko dan pengendalian sesuai tujuan Perangkat Daerah	6. Penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan pengendalian sesuai tujuan Perangkat Daerah	6. Pemantapan manajemen organisasi berbasis risiko dan pengendalian sesuai tujuan Perangkat Daerah

3.3. Manajemen Risiko Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Rentra PD dilakukan pada level tujuan dan sasaran perangkat daerah, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya.

Hasil identifikasi terdapat 8 (delapan) pernyataan risiko di level sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, yaitu sebagai berikut :

1. Terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air tanah;
2. Terjadinya *land subsidence* (penurunan muka air tanah);
3. Kegiatan pertambangan yang tidak dikelola sesuai kaidah pertambangan;
4. Lambatnya pertumbuhan EBT di Jawa Tengah yang berpengaruh pada besaran porsi EBT dalam bauran energi;
5. Distribusi listrik yang belum merata;
6. Terjadinya bencana kebakaran karena instalasi listrik dari pembangkitan;
7. Kualitas layanan Dinas ESDM Prov. Jateng tidak memuaskan (tidak sesuai SOP); dan
8. Terjadinya risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Sesuai dengan perhitungan skala resiko terdapat pernyataan resiko yang membutuhkan Rencana Tindak Pengendalian. Rencana tindak pengendalian terhadap risiko di level sasaran pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 sesuai Tabel 3.3.

Tabel 3.4.
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Tujuan: Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan	Indeks Pengelolaan Air Tanah							
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan air tanah	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Terjadinya Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah	15	1. Masyarakat belum paham terhadap regulasi air tanah; 2. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat	1. Prinsip konservasi air tanah tidak tercapai, sehingga terjadinya kerusakan lingkungan air tanah;	1. Penyusunan zona konservasi air tanah pada wilayah CAT kewenangan Pemprov; 2. Pemberian Perijinan Air Tanah melalui	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				yang bersumber dari air permukaan; 3. Keengganan masyarakat dan pelaku usaha pengguna air tanah untuk mengurus perijinan air tanah; 4. Kurang pedulinya masyarakat/ pemanfaat air tanah terhadap kelangsungan Sumber Daya Alam.	2. Penerimaan Pajak air tanah tidak maksimal; 3. Pengambilan Air Tanah tanpa izin sering memicu konflik horisontal sesama pengguna air tanah.	DPMPTSP Prov. Jateng, dengan rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM Prov. Jateng; 3. Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah.		

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Terjadinya land subsidence (penurunan muka air tanah)	10	Pengambilan air tanah yang berlebihan	1. Kerusakan bangunan dan infrastruktur 2. Peningkatan risiko banjir di daerah dataran rendah 3. Kerusakan permanen pada akuifer air tanah dan ekosistem perairan	Koordinasi dengan Instansi terkait untuk penertiban penggunaan air tanah.	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029
Tujuan: Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien	Kontribusi PDRB sektor pertambangan							

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
dan Berkelanjutan								
Sasaran: Meningkatnya penerapan Good Mining Practice (GMP)	Persentase penerapan *Good Mining Practice* (GMP)	Kegiatan Pertambangan yang tidak dikelola sesuai Kaidah Pertambangan	12	1. Adanya potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada suatu wilayah yang belum terakomodir di dalam RTRW Kab./Kota; 2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum/aturan yang berlaku, rendahnya kesadaran pelaku	1. Semakin meningkatnya kerusakan lingkungan bekas lokasi pertambangan tanpa izin, karena aktifitas penambangan ilegal tidak menerapkan asas Good Mining Practice; 2. Semakin banyak potensi pajak sektor pertambanga	1. Penyusunan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Mengintensifkan kegiatan pembinaan dan pengawasan	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				penambangan ilegal untuk mengajukan izin, dan rendahnya kepedulian terhadap kelangsungan sumber daya alam.	n yang tidak terbayarkan.	kegiatan pertambangan bersama multisektoral, baik secara vertikal maupun horizontal; 3. Rapat koordinasi antara pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten tentang sinkronisasi Tata Ruang dalam mengakomodi		

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
						r potensi MBLB. 4. Rapat Koordinasi tentang Opsen Pajak MBLB		
Tujuan: Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan	Intensitas Energi Primer							
Sasaran: Meningkatnya porsi energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Lambatnya pertumbuhan EBT di Jawa Tengah yang	12	1. Infrastruktur EBT yang terbangun tidak termanfaatkan secara optimal;	1. Tidak tercapainya target bauran energi secara regional	1. Pemetaan potensi EBT di Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
(EBT) dalam bauran energi primer		berpengaruh pada besaran porsi EBT dalam Bauran Energi		2. Energi fosil mudah diperoleh.	maupun nasional 2. Pemanasan global dan perubahan iklim	2. Optimalilsai pengembangan DME 3. Pembangunan Infrastruktur EBT yang berkelanjutan 4. Evaluasi RUED dan Revisi RUED		
Tujuan: Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan	Konsumsi Listrik per Kapita							

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Sasaran: Terjaganya ketersediaan daya listrik	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Distribusi listrik yang belum merata	12	Ketersediaan daya listrik di Jawa Tengah oversupply	menghambat transisi energi dan pengembangan infrastruktur EBT	1. Meningkatkan distribusi listrik untuk keluarga tidak mampu 2. Koordinasi dengan PT. PLN (Persero) untuk penambahan jaringan listrik di pemukiman baru/wilayah pelosok; 3. Sosialisasi *Electrifying Lifestyle* untuk peningkatan distribusi/kon	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
						sumsi energi listrik.		
		Terjadinya bencana kebakaran karena instalasi listrik dari pembangkitan	12	1. Keandalan pasokan listrik PLN yang kurang stabil yang memicu penggunaan energi listrik non PLN sebagai energi cadangan; 2. Masyarakat kurang memahami keselamatan ketenagalistrikan.	Kerugian secara material dan adanya korban jiwa	1. Sosialisasi Keselamatan Ketenagalistrikan secra masif melalui media sosial; 2. Memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Tujuan: Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Kualitas layanan Dinas ESDM Prov. Jateng tidak memuaskan (tidak sesuai SOP)	10	1. Tingkat kompetensi pegawai yang masih rendah sebagai pelayan publik; 2. Belum terpenuhinya fasilitas sarana prasarana pelayanan publik yang baik; 3. Belum optimalnya sistem informasi pelayanan public.	Muncul aduan masyarakat	1. Penertiban pelayanan sesuai SOP; 2. Peningkatan kapasitas SDM; 3. Peningkatan sarana dan prasaranan layanan.	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah *	Terjadinya Risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi.	10	1. Kurangnya komitmen pimpinan dalam menerapkan manajemen risiko; 2. Terjadinya risiko karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan; 3. Tingkat kompetensi pegawai yang masih rendah dalam hal manajemen risiko.	Ketidaktercapaian target-target pada indikator kinerja, baik level Tujuan OPD, Sasaran OPD, level Program, level Kegiatan, dan level Sub Kegiatan berdasarkan perencanaan.	Melaksanakan pengelolaan risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko atau meminimalisir dampak.	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029

BAB IV

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan di lingkup energi dan sumber daya mineral sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2025 – 2029, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah menetapkan empat program prioritas sebagai pilar utama pelaksanaan kebijakan. Program-program tersebut dirancang secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, serta difokuskan pada capaian yang nyata, berkelanjutan, dan berorientasi pada masyarakat. Penjelasan masing-masing program tersebut sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan konservasi air tanah melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi nilai perolehan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah; kajian evaluasi zona konservasi pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi; penyusunan kajian rekomendasi teknis air tanah pada wilayah sungai Pemali Comal dan wilayah sungai Bodri Kuto; indentifikasi zona pemanfaatan dan konservasi pada kawasan non CAT; kajian neraca air tanah dalam upaya pengelolaan air tanah yang berbasis konservasi dan berkelanjutan; penyusunan regulasi pengelolaan air tanah di Jawa Tengah; monitoring terjadinya *land subsidence*/amblesan tanah; pengembangan Sistem Aplikasi Geologi dan Air Tanah. Program ini juga ditujukan untuk mendukung terwujudnya kelestarian warisan geologi/*Geoheritage* di Jawa Tengah sebagai upaya perlindungan kawasan geologi melalui pelaksanaan jelajah *geopark/geoheritage;* Penguatan mitra tim koordinasi pengembangan *geopark*/penetapan *geoheritage*; Peningkatan kapasitas pengelola *geopark/geoheritage;* selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana melalui monitoring potensi kebencanaan geologi (*geological hazard*).

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan pada peningkatan transformasi tata kelola kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan *good mining practice* dengan kegiatan pengawasan dan

pengendalian kegiatan usaha pertambangan, penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan:optimalisasi sinergi Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah, pengembangan sistem layanan pertambangan minerba melalui *updating* sistem SILUP (Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan), pemberian penghargaan *good mining practice* sebagai bentuk pembinaan dan apresiasi terhadap pelaku usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*, kegiatan penertiban PETI (Pertambangan Tanpa Izin) bersama aparat penegak hukum dan *stakeholder* terkait lainnya; serta peningkatan kompetensi SDM pada bidang pertambangan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada mahasiswa kebumian dan evaluasinya. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah.

c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan konservasi energi dan transisi energi daerah dengan peningkatan desa mandiri energi melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT (Biogas, gas rawa, dan tenaga surya); kajian pengembangan desa mandiri energi dan gerakan hemat energi dan air; fasilitasi dan koordinasi kepada *stakeholders* dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan EBT di Jawa Tengah; penyusunan regulasi daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED); indentifikasi Desa Mandiri Energi dengan pemberian penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang memenuhi DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan; serta dukungan pada program Eco-Pesantren berupa pembangunan infrastruktur EBT di pondok pesantren. Selain itu, dalam rangka mendukung konservasi energi dilaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan/atau strategi konservasi energi; pendampingan implementasi konservasi energi; serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan program konservasi energi.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita dan kehandalan pasokan listrik melalui kegiatan pengawasan dan pengendaliaan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi; fasilitasi

peningkatan kapasitas tenaga listrik ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2; sosialisasi penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik dalam kehidupan sehari-hari atau *electrifying lifestyle*; peningkatan kapasitas sumber daya manuasia di Jawa Tengah pada sektor ketenagalistrikan melalui kegiatan sertifikasi kompentensi tenaga teknik ketenagalistrikan; menjangkau akses energi listrik untuk masyarakat miskin yang belum berlistrik; peningkatan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; dan penyusunan Perda ketenagalistrikan.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, output/outcome indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2026 – 2030 yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana Tabel 4.1

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan *								**1.647.531.000**		**2.095.245.000**		**3.347.400.000**		**4.819.800.000**		**5.457.600.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
				Indeks Pengelolaan Air Tanah *	Angka	516	360		365		370		375		380		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya ketersediaan air tanah **							**1.647.531.000**		**2.095.245.000**		**3.347.400.000**		**4.819.800.000**		**5.457.600.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
				Indeks Ketersediaan Air Tanah **	Angka	3,65	3,67	1.647.531.000	3,68	2.095.245.000	3,69	3.347.400.000	3,7	4.819.800.000	3,71	5.457.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN ***						1.647.531.000		2.095.245.000		3.347.400.000		4.819.800.000		5.457.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Menurunnya pengambilan air tanah di Jawa Tengah	Persentase Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah ***	%	27,5	27,58	577.131.000	27,65	1.031.845.000	27,65	1.350.000.000	27,6	1.700.000.000	27,55	2.200.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah	
		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ****						400.000.000		810.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah	
			Tersedianya data geologi untuk konservasi di wilayah Jawa Tengah	Jumlah Cakupan Wilayah Penyediaan Data Geologi Untuk Konservasi Di Jawa Tengah ****	Kabupaten/Kota	35	35	400.000.000	35	810.000.000	35	1.000.000.000	35	1.200.000.000	35	1.500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah *****						400.000.000		810.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah	
			Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	2	4	400.000.000	4	810.000.000	4	1.000.000.000	4	1.200.000.000	4	1.500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah	BANJARNEGARA, BANYUMAS, BATANG, Bidang Geologi dan Air Tanah, BLORA, BOYOLALI, BREBES, CILACAP, DEMAK, GROBOGAN, JEPARA, KARANGANYAR, KEBUMEN, KENDAL, KLATEN, KOTA MAGELANG, KOTA PEKALONGAN, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA TEGAL, KUDUS, MAGELANG, PATI, PEKALONGAN, PEMALANG, PURBALINGGA, PURWOREJO, REMBANG, SEMARANG, SRAGEN, SUKOHARJO, TEGAL, TEMANGGUNG, WONOGIRI, WONOSOBO
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ****						177.131.000		221.845.000		350.000.000		500.000.000		700.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Jawa Tengah	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah ****	%	100	100	177.131.000	100	221.845.000	100	350.000.000	100	500.000.000	100	700.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah	
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah *****						177.131.000		221.845.000		350.000.000		500.000.000		700.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah	
			Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	4	4	177.131.000	4	221.845.000	4	350.000.000	4	500.000.000	4	700.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah	BANJARNEGARA, BANYUMAS, BATANG, Bidang Geologi dan Air Tanah, BLORA, BOYOLALI, BREBES, CILACAP, DEMAK, GROBOGAN, JEPARA, KARANGANYAR, KEBUMEN, KENDAL, KLATEN, KOTA MAGELANG, KOTA PEKALONGAN, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA TEGAL, KUDUS, MAGELANG, PATI, PEKALONGAN, PEMALANG, PURBALINGGA, PURWOREJO, REMBANG, SEMARANG, SRAGEN, SUKOHARJO, TEGAL, TEMANGGUNG, WONOGIRI, WONOSOBO
			Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Solo	Persentase pengambilan air tanah	%	1,33	2,98	71.000.000	2,98	70.300.000	2,97	154.400.000	2,97	259.400.000	2,96	267.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral -	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Wilayah Solo ***													Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ****						71.000.000		70.300.000		154.400.000		259.400.000		267.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
			Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo ****	%	100	100	71.000.000	100	70.300.000	100	154.400.000	100	259.400.000	100	267.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah *****						71.000.000		70.300.000		154.400.000		259.400.000		267.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	36	40	71.000.000	42	70.300.000	46	154.400.000	47	259.400.000	48	267.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo, KARANGANYAR, KOTA SURAKARTA, SRAGEN
			Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Kendeng Muria	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria ***	%	2,55	3,3	43.000.000	3,28	39.500.000	3,27	125.000.000	3,26	234.200.000	3,25	242.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ****						43.000.000		39.500.000		125.000.000		234.200.000		242.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
			Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di	%	100	100	43.000.000	100	39.500.000	100	125.000.000	100	234.200.000	100	242.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Kendeng Muria	Wilayah Kendeng Muria ****													BATUBARA	
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah *****						43.000.000		39.500.000		125.000.000		234.200.000		242.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	29	20	43.000.000	20	39.500.000	25	125.000.000	28	234.200.000	30	242.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, JEPARA, KUDUS, PATI
			Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Utara	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara ***	%	1,43	1,58	89.200.000	1,57	91.300.000	1,57	172.600.000	1,56	281.800.000	1,56	295.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ****						89.200.000		91.300.000		172.600.000		281.800.000		295.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
			Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara ****	%	100	100	89.200.000	100	91.300.000	100	172.600.000	100	281.800.000	100	295.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah *****						89.200.000		91.300.000		172.600.000		281.800.000		295.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan	Lapor	58	53	89.200.000	57	91.300.000	59	172.600.000	62	281.800.000	68	295.200.000	SEKSI	BATANG, Cabang

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Daerah Provinsi	Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi *****	a n												GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara, KOTA PEKALONGAN, PEKALONGAN
			Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan ***	%	1,94	1,98	43.000.000	1,97	39.500.000	1,96	123.600.000	1,95	228.600.000	1,95	239.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ****						43.000.000		39.500.000		123.600.000		228.600.000		239.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
			Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan ****	%	100	100	43.000.000	100	39.500.000	100	123.600.000	100	228.600.000	100	239.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah *****						43.000.000		39.500.000		123.600.000		228.600.000		239.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	24	20	43.000.000	20	39.500.000	24	123.600.000	26	228.600.000	28	239.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan, KEBUMEN, PURWOREJO, WONOSOBO
			Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Slamet Utara	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara ***	%	3,83	3,95	89.200.000	3,94	92.700.000	3,93	176.800.000	3,92	281.800.000	3,92	285.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	Slamet Utara	
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ****						89.200.000		92.700.000		176.800.000		281.800.000		285.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
			Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Utara	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Utara ****	%	100	100	89.200.000	100	92.700.000	100	176.800.000	100	281.800.000	100	285.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah *****						89.200.000		92.700.000		176.800.000		281.800.000		285.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	50	53	89.200.000	58	92.700.000	62	176.800.000	63	281.800.000	64	285.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BREBES, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara, KOTA TEGAL, PEMALANG, TEGAL
			Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Kendeng Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan ***	%	2,22	2,27	43.000.000	2,26	39.500.000	2,26	125.000.000	2,25	230.000.000	2,25	239.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ****						43.000.000		39.500.000		125.000.000		230.000.000		239.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
			Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di	%	100	100	43.000.000	100	39.500.000	100	125.000.000	100	230.000.000	100	239.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Kendeng Selatan	Wilayah Kendeng Selatan ****													BATUBARA	
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah *****						43.000.000		39.500.000		125.000.000		230.000.000		239.200.000		
			Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	21	20	43.000.000	20	39.500.000	25	125.000.000	28	230.000.000	30	239.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BLORA, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, GROBOGAN, REMBANG
			Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Slamet Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan ***	%	2,5	2,6	43.000.000	2,59	39.500.000	2,58	125.000.000	2,58	234.200.000	2,57	242.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ****						43.000.000		39.500.000		125.000.000		234.200.000		242.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
			Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan ****	%	100	100	43.000.000	100	39.500.000	100	125.000.000	100	234.200.000	100	242.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah *****						43.000.000		39.500.000		125.000.000		234.200.000		242.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian		43	20	43.000.000	20	39.500.000	25	125.000.000	28	234.200.000	30	242.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi *****	Laporan												SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BANYUMAS, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan, CILACAP
			Terpenuhinya pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah ***	%	100	100	450.000.000	100	450.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ****						450.000.000		450.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
			Meningkatnya pengujian air tanah di Jawa Tengah	Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah ****	%	100	100	450.000.000	100	450.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah *****						450.000.000		450.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi	Dokum	1452	1100	450.000.000	1100	450.000.000	1100	550.000.000	1100	600.000.000	1100	650.000.000		BANJARNEGARA, BANYUMAS, BATANG, BLORA, BOYOLALI, BREBES, CILACAP, DEMAK, GROBOGAN, JEPARA, KARANGANYAR, KEBUMEN,

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul *****	en												SEKSI PENGUJIAN AIR	KENDAL, KLATEN, KOTA MAGELANG, KOTA PEKALONGAN, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA TEGAL, KUDUS, Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A, MAGELANG, PATI, PEKALONGAN, PEMALANG, PURBALINGGA, PURWOREJO, REMBANG, SEMARANG, SRAGEN, SUKOHARJO, TEGAL, TEMANGGUNG, WONOGIRI, WONOSOBO
			Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Semarang - Demak	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak ***	%	2,18	6,99	113.000.000	6,98	119.300.000	6,97	200.600.000	6,96	308.400.000	6,95	323.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ****						113.000.000		119.300.000		200.600.000		308.400.000		323.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	Wilayah Semarang - Demak	
			Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang - Demak	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang Demak ****	%	100	100	113.000.000	100	119.300.000	100	200.600.000	100	308.400.000	100	323.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah *****						113.000.000		119.300.000		200.600.000		308.400.000		323.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	49	70	113.000.000	77	119.300.000	79	200.600.000	81	308.400.000	88	323.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak, DEMAK, KENDAL, KOTA SEMARANG
			Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Merapi	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi ***	%	2,48	2,65	43.000.000	2,64	39.500.000	2,63	120.800.000	2,62	230.000.000	2,62	235.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ****						43.000.000		39.500.000		120.800.000		230.000.000		235.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi ****	%	100	100	43.000.000	100	39.500.000	100	120.800.000	100	230.000.000	100	235.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah *****						43.000.000		39.500.000		120.800.000		230.000.000		235.000.000		
			Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	30	20	43.000.000	20	39.500.000	22	120.800.000	25	230.000.000	26	235.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BOYOLALI, Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi, KLATEN, KOTA MAGELANG, MAGELANG
			Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Tengah	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah ***	%	1,47	1,49	43.000.000	1,48	42.300.000	1,48	123.600.000	1,47	231.400.000	1,47	239.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ****						43.000.000		42.300.000		123.600.000		231.400.000		239.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
			Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan NPA di Serayu Tengah	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Tengah ****	%	100	100	43.000.000	100	42.300.000	100	123.600.000	100	231.400.000	100	239.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan						43.000.000		42.300.000		123.600.000		231.400.000		239.200.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Air Tanah *****																
			Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	22	20	43.000.000	22	42.300.000	24	123.600.000	26	231.400.000	28	239.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BANJARNEGARA, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah, PURBALINGGA
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *								**54.630.568.000**		**56.364.067.000**		**62.833.046.000**		**67.175.056.000**		**71.673.149.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah *	Angka	79,68	79,71		79,72		79,73		79,74		79,75		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah **							**53.666.147.000**		**55.314.054.000**		**61.573.031.000**		**65.663.039.000**		**69.938.295.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah **	Angka	90,5	89,2	53.666.147.000	89,4	55.314.054.000	89,6	61.573.031.000	89,8	65.663.039.000	90	69.938.295.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	42.729.292.000	100	45.060.007.000	100	47.901.926.000	100	50.759.562.000	100	53.908.875.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						36.811.180.000		38.636.030.000		40.612.493.000		42.664.889.000		44.791.764.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	36.811.180.000	12	38.636.030.000	12	40.612.493.000	12	42.664.889.000	12	44.791.764.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****						36.165.000.000		37.973.250.000		39.871.913.000		41.865.509.000		43.958.784.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/ Bulan	190	234	36.165.000.000	234	37.973.250.000	234	39.871.913.000	234	41.865.509.000	234	43.958.784.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						456.180.000		462.780.000		470.580.000		487.380.000		489.780.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	1	456.180.000	1	462.780.000	1	470.580.000	12	487.380.000	12	489.780.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****						100.000.000		100.000.000		150.000.000		180.000.000		198.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	180.000.000	12	198.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/						90.000.000		100.000.000		120.000.000		132.000.000		145.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Triwulanan/Semester an SKPD *****																
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD *****	Laporan	12	12	90.000.000	12	100.000.000	12	120.000.000	12	132.000.000	12	145.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						400.000.000		410.000.000		455.000.000		546.000.000		600.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	12	12	400.000.000	12	410.000.000	12	455.000.000	12	546.000.000	12	600.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						350.000.000		350.000.000		385.000.000		462.000.000		508.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	12	12	350.000.000	12	350.000.000	12	385.000.000	12	462.000.000	12	508.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						50.000.000		60.000.000		70.000.000		84.000.000		92.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	N	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	12	12	50.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000	12	84.000.000	12	92.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****						169.000.000		193.200.000		227.520.000		280.424.000		399.946.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	169.000.000	100	193.200.000	100	227.520.000	100	280.424.000	100	399.946.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****						0		0		0		0		94.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	235	94.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****						45.000.000		55.000.000		60.500.000		80.000.000		88.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	12	1	45.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	80.000.000	1	88.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****						84.000.000		88.200.000		97.020.000		116.424.000		128.066.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	8	13	84.000.000	13	88.200.000	13	97.020.000	13	116.424.000	13	128.066.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****						20.000.000		25.000.000		35.000.000		42.000.000		44.940.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	72	40	20.000.000	40	25.000.000	40	35.000.000	72	42.000.000	72	44.940.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan *****						20.000.000		25.000.000		35.000.000		42.000.000		44.940.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	10	10	20.000.000	10	25.000.000	10	35.000.000	10	42.000.000	10	44.940.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						849.952.000		832.030.000		1.170.864.000		1.626.077.000		1.577.369.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat	%	100	100	849.952.000	100	832.030.000	100	1.170.864.000	100	1.626.077.000	100	1.577.369.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				daerah yang sesuai standar layanan ****														
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						50.000.000		55.000.000		77.000.000		92.400.000		100.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	77.000.000	1	92.400.000	1	100.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						134.452.000		80.000.000		150.000.000		236.650.000		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	134.452.000	2	80.000.000	2	150.000.000	2	236.650.000	2	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						30.000.000		35.000.000		50.000.000		65.000.000		65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	3	3	30.000.000	3	35.000.000	3	50.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						100.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	150.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						40.000.000		44.000.000		55.000.000		75.000.000		75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	40.000.000	1	44.000.000	1	55.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan *****						12.000.000		12.000.000		20.000.000		24.000.000		28.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	12.000.000	12	12.000.000	12	20.000.000	12	24.000.000	12	28.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						35.000.000		45.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	35.000.000	12	45.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						383.500.000		380.530.000		458.864.000		641.027.000		663.469.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	383.500.000	12	380.530.000	12	458.864.000	12	641.027.000	12	663.469.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						25.000.000		30.500.000		40.000.000		58.000.000		60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		*****															N	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	12	12	25.000.000	12	30.500.000	12	40.000.000	12	58.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****						40.000.000		50.000.000		70.000.000		84.000.000		85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	70.000.000	12	84.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						887.000.000		650.000.000		350.000.000		400.000.000		930.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	6	7	887.000.000	8	650.000.000	7	350.000.000	7	400.000.000	9	930.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan						720.000.000		0		0		0		0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Dinas Jabatan *****															N	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	0	1	720.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						0		600.000.000		0		0		600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	2	N/A	0	2	600.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pengadaan Mebel *****						67.000.000		0		100.000.000		100.000.000		30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	67.000.000	N/A	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan						100.000.000		50.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Lainnya *****																
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	5	5	100.000.000	5	50.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						2.802.160.000		3.743.747.000		4.316.049.000		4.298.172.000		4.808.996.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	2.802.160.000	12	3.743.747.000	12	4.316.049.000	12	4.298.172.000	12	4.808.996.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						30.000.000		33.000.000		40.000.000		48.000.000		52.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	30.000.000	12	33.000.000	12	40.000.000	12	48.000.000	12	52.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						700.000.000		700.000.000		850.000.000		900.000.000		950.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	12	12	700.000.000	12	700.000.000	12	850.000.000	12	900.000.000	12	950.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Disediakan *****														
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						35.000.000		35.000.000		42.000.000		50.400.000		55.440.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	1	35.000.000	1	35.000.000	1	42.000.000	1	50.400.000	1	55.440.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						2.037.160.000		2.975.747.000		3.384.049.000		3.299.772.000		3.750.756.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	2.037.160.000	12	2.975.747.000	12	3.384.049.000	12	3.299.772.000	12	3.750.756.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						810.000.000		595.000.000		770.000.000		944.000.000		800.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	72	57	810.000.000	57	595.000.000	57	770.000.000	57	944.000.000	57	800.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				****														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						40.000.000		45.000.000		55.000.000		66.000.000		72.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	4	4	40.000.000	4	45.000.000	4	55.000.000	4	66.000.000	4	72.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						100.000.000		100.000.000		110.000.000		132.000.000		145.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	100.000.000	17	100.000.000	17	110.000.000	17	132.000.000	17	145.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			atau Lapangan	*****														
		Pemeliharaan Mebel *****						20.000.000		0		0		20.000.000		22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	5	4	20.000.000	N/A	0	N/A	0	2	20.000.000	2	22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						200.000.000		200.000.000		220.000.000		264.000.000		290.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	0	20	200.000.000	20	200.000.000	20	220.000.000	20	264.000.000	20	290.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						50.000.000		50.000.000		55.000.000		66.000.000		70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	66.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						300.000.000		100.000.000		220.000.000		264.000.000		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	300.000.000	1	100.000.000	1	220.000.000	1	264.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana						100.000.000		100.000.000		110.000.000		132.000.000		100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****															KEPEGAWAIAN	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	20	10	100.000.000	20	100.000.000	20	110.000.000	20	132.000.000	20	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	1.327.580.000	100	1.028.743.000	100	1.363.412.000	100	1.456.519.000	100	1.572.990.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		90.960.000		91.560.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	83.940.000	12	85.560.000	12	86.760.000	12	90.960.000	12	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		90.960.000		91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Dokumen	12	1	83.940.000	1	85.560.000	1	86.760.000	1	90.960.000	1	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Tugas ASN *****														
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						295.673.000		237.000.000		359.250.000		444.920.000		461.573.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	295.673.000	100	237.000.000	100	359.250.000	100	444.920.000	100	461.573.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						25.000.000		15.000.000		16.050.000		16.500.000		12.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	25.000.000	1	15.000.000	1	16.050.000	1	16.500.000	1	12.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						70.000.000		40.000.000		70.000.000		77.000.000		85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	70.000.000	2	40.000.000	2	70.000.000	2	77.000.000	2	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Penyediaan Peralatan Rumah						25.000.000		30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tangga *****																
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	2	2	25.000.000	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						50.000.000		30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	4	4	50.000.000	4	30.000.000	4	33.000.000	4	36.300.000	4	39.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						15.000.000		20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.500.000		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						25.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	25.000.000	12	30.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						79.673.000		66.000.000		129.200.000		197.120.000		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	79.673.000	12	66.000.000	12	129.200.000	12	197.120.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						55.000.000		20.000.000		130.000.000		100.000.000		133.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	37	2	55.000.000	2	20.000.000	3	130.000.000	3	100.000.000	3	133.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						10.000.000		0		30.000.000		30.000.000		33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	10.000.000	N/A	0	1	30.000.000	2	30.000.000	2	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						45.000.000		20.000.000		100.000.000		70.000.000		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	37	5	45.000.000	5	20.000.000	5	100.000.000	5	70.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						552.967.000		595.183.000		654.402.000		674.339.000		725.927.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	552.967.000	12	595.183.000	12	654.402.000	12	674.339.000	12	725.927.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						10.000.000		10.000.000		10.701.000		11.000.000		11.771.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.701.000	12	11.000.000	12	11.771.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						120.800.000		120.800.000		132.880.000		146.168.000		160.784.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	120.800.000	12	120.800.000	12	132.880.000	12	146.168.000	12	160.784.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						422.167.000		464.383.000		510.821.000		517.171.000		553.372.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	422.167.000	12	464.383.000	12	510.821.000	12	517.171.000	12	553.372.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						340.000.000		91.000.000		133.000.000		146.300.000		160.930.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	25	7	340.000.000	8	91.000.000	8	133.000.000	8	146.300.000	8	160.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,						70.000.000		70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000	SUB BAGIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****															TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	3	7	70.000.000	7	70.000.000	7	77.000.000	7	84.700.000	7	93.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Mebel *****						0		0		11.000.000		12.100.000		13.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	N/A	0	N/A	0	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						250.000.000		10.000.000		30.000.000		33.000.000		36.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	250.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA SURAKARTA, OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan						20.000.000		11.000.000		15.000.000		16.500.000		18.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Lainnya *****																
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	20	5	20.000.000	5	11.000.000	5	15.000.000	10	16.500.000	10	18.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	912.830.000	100	902.035.000	100	1.220.433.000	100	1.306.615.000	100	1.411.984.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		90.960.000		91.560.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	83.940.000	12	85.560.000	12	86.760.000	12	90.960.000	12	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		90.960.000		91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1	83.940.000	1	85.560.000	1	86.760.000	1	90.960.000	1	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				*****														
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						199.840.000		202.000.000		337.800.000		421.580.000		445.836.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	199.840.000	100	202.000.000	100	337.800.000	100	421.580.000	100	445.836.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						15.000.000		20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						60.000.000		40.000.000		70.000.000		77.000.000		85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	60.000.000	2	40.000.000	2	70.000.000	3	77.000.000	3	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Penyediaan Peralatan Rumah						10.000.000		15.000.000		16.500.000		18.150.000		18.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tangga *****																
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	2	10.000.000	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	18.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						30.000.000		30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	33.000.000	3	36.300.000	3	39.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						10.000.000		10.000.000		16.500.000		18.150.000		18.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	1	18.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan *****						6.000.000		6.000.000		6.600.000		7.260.000		7.986.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.600.000	12	7.260.000	12	7.986.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						15.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	15.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						53.840.000		61.000.000		123.200.000		190.520.000		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	53.840.000	12	61.000.000	12	123.200.000	12	190.520.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						50.000.000		20.000.000		130.000.000		100.000.000		110.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	50	2	50.000.000	2	20.000.000	3	130.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						10.000.000		0		30.000.000		30.000.000		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	10.000.000	N/A	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				*****														
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						40.000.000		20.000.000		100.000.000		70.000.000		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	40.000.000	1	20.000.000	1	100.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						469.050.000		508.475.000		554.873.000		571.975.000		603.038.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	469.050.000	12	508.475.000	12	554.873.000	12	571.975.000	12	603.038.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						10.000.000		10.000.000		5.725.000		6.297.000		6.297.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.725.000	12	6.297.000	12	6.297.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						96.800.000		100.000.000		110.826.000		121.908.000		121.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		*****																
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	96.800.000	12	100.000.000	12	110.826.000	12	121.908.000	12	121.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						362.250.000		398.475.000		438.322.000		443.770.000		474.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	362.250.000	12	398.475.000	12	438.322.000	12	443.770.000	12	474.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						110.000.000		86.000.000		111.000.000		122.100.000		161.550.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	43	6	110.000.000	6	86.000.000	7	111.000.000	6	122.100.000	6	161.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan						50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****															SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.500.000	3	66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Pemeliharaan Mebel *****						0		0		11.000.000		12.100.000		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	2	N/A	0	N/A	0	2	11.000.000	2	12.100.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						50.000.000		25.000.000		30.000.000		33.000.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	50.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	33.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						10.000.000		11.000.000		15.000.000		16.500.000		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi *****	Unit	37	5	10.000.000	5	11.000.000	5	15.000.000	10	16.500.000	10	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PATI

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	860.080.000	100	868.490.000	100	1.171.507.000	100	1.336.862.000	100	1.351.956.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	83.940.000	12	85.560.000	12	86.760.000	12	95.436.000	12	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	1	83.940.000	1	85.560.000	1	86.760.000	1	95.436.000	1	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						179.840.000		207.000.000		334.800.000		416.485.000		429.244.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	179.840.000	100	207.000.000	100	334.800.000	100	416.485.000	100	429.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						15.000.000		20.000.000		21.400.000		22.000.000		12.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	21.400.000	1	22.000.000	1	12.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						40.000.000		40.000.000		70.000.000		77.000.000		85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	70.000.000	2	77.000.000	2	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10.000.000		15.000.000		16.050.000		16.500.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	4	2	10.000.000	2	15.000.000	2	16.050.000	2	16.500.000	2	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						30.000.000		30.000.000		32.100.000		35.310.000		38.841.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	32.100.000	3	35.310.000	3	38.841.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000		15.000.000		16.050.000		17.655.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		*****																
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.655.000	1	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.500.000		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	7.500.000	5	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						15.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	15.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						53.840.000		61.000.000		123.200.000		190.520.000		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	53.840.000	12	61.000.000	12	123.200.000	12	190.520.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						50.000.000		20.000.000		130.000.000		143.000.000		110.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	6	2	50.000.000	2	20.000.000	2	130.000.000	2	143.000.000	2	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						10.000.000		0		30.000.000		30.000.000		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	N/A	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						40.000.000		20.000.000		100.000.000		113.000.000		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	2	1	40.000.000	1	20.000.000	3	100.000.000	1	113.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						436.300.000		469.930.000		508.947.000		559.841.000		604.602.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
			Tersedianya jasa penunjang urusan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang			12	436.300.000	12	469.930.000	12	508.947.000	12	559.841.000	12	604.602.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12											SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						10.000.000		10.000.000		5.724.000		6.296.000		6.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.724.000	12	6.296.000	12	6.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						90.000.000		90.000.000		96.300.000		105.930.000		105.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	90.000.000	12	90.000.000	12	96.300.000	12	105.930.000	12	105.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						336.300.000		369.930.000		406.923.000		447.615.000		492.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	336.300.000	12	369.930.000	12	406.923.000	12	447.615.000	12	492.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah						110.000.000		86.000.000		111.000.000		122.100.000		116.550.000	Dinas Energi dan Sumber	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****															Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	47	6	110.000.000	6	86.000.000	6	111.000.000	9	122.100.000	9	116.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.500.000	3	66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Mebel *****						0		0		11.000.000		0		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	N/A	0	N/A	0	1	11.000.000	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Gedung Kantor						50.000.000		25.000.000		30.000.000		45.100.000		30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		dan Bangunan Lainnya *****																
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	50.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	45.100.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						10.000.000		11.000.000		15.000.000		16.500.000		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	42	5	10.000.000	5	11.000.000	5	15.000.000	10	16.500.000	10	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA PEKALONGAN, OPD Provinsi
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	822.292.000	100	844.448.000	100	1.145.113.000	100	1.259.623.000	100	1.355.222.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang	Dokumen	12	12	83.940.000	12	85.560.000	12	86.760.000	12	95.436.000	12	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				disusun****														
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	1	83.940.000	1	85.560.000	1	86.760.000	1	95.436.000	1	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						179.840.000		207.000.000		334.800.000		368.280.000		429.244.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	179.840.000	100	207.000.000	100	334.800.000	100	368.280.000	100	429.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						15.000.000		20.000.000		21.400.000		22.000.000		12.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	21.400.000	1	22.000.000	1	12.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan						40.000.000		40.000.000		70.000.000		77.000.000		85.000.000	SUB BAGIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kantor *****															TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	70.000.000	2	77.000.000	2	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10.000.000		15.000.000		16.050.000		16.500.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	4	2	10.000.000	2	15.000.000	2	16.050.000	2	16.500.000	2	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						30.000.000		30.000.000		32.100.000		35.310.000		38.841.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	5	5	30.000.000	5	30.000.000	5	32.100.000	5	35.310.000	5	38.841.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						10.000.000		15.000.000		16.050.000		17.173.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.173.000	1	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.500.000		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						15.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	15.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						53.840.000		61.000.000		123.200.000		142.797.000		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	53.840.000	12	61.000.000	12	123.200.000	12	142.797.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						40.000.000		20.000.000		130.000.000		143.000.000		100.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	2	40.000.000	2	20.000.000	3	130.000.000	3	143.000.000	3	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						0		0		30.000.000		30.000.000		0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	0	N/A	0	N/A	0	1	30.000.000	1	30.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						40.000.000		20.000.000		100.000.000		113.000.000		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	3	40.000.000	3	20.000.000	3	100.000.000	3	113.000.000	3	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						408.512.000		445.888.000		482.553.000		530.807.000		572.868.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	408.512.000	12	445.888.000	12	482.553.000	12	530.807.000	12	572.868.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						10.000.000		10.000.000		5.725.000		6.297.000		6.297.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.725.000	12	6.297.000	12	6.297.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya						82.500.000		88.275.000		94.454.000		103.899.000		103.899.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Air dan Listrik *****																
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	82.500.000	12	88.275.000	12	94.454.000	12	103.899.000	12	103.899.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						316.012.000		347.613.000		382.374.000		420.611.000		462.672.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	316.012.000	12	347.613.000	12	382.374.000	12	420.611.000	12	462.672.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						110.000.000		86.000.000		111.000.000		122.100.000		161.550.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	33	9	110.000.000	6	86.000.000	5	111.000.000	9	122.100.000	11	161.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.500.000	3	66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Pemeliharaan Mebel *****						0		0		11.000.000		0		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	2	N/A	0	N/A	0	2	11.000.000	N/A	0	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						50.000.000		25.000.000		30.000.000		45.100.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	1	1	50.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	45.100.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor						10.000.000		11.000.000		15.000.000		16.500.000		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		atau Bangunan Lainnya *****																
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	27	5	10.000.000	5	11.000.000	5	15.000.000	10	16.500.000	10	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, PURWOREJO
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	831.185.000	100	843.305.000	100	1.143.935.000	100	1.258.327.000	100	1.364.111.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	83.940.000	12	85.560.000	12	86.760.000	12	95.436.000	12	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	1	83.940.000	1	85.560.000	1	86.760.000	1	95.436.000	1	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat						179.840.000		207.000.000		334.800.000		368.280.000		429.244.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral -	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Daerah ****															Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	179.840.000	100	207.000.000	100	334.800.000	100	368.280.000	100	429.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						15.000.000		20.000.000		21.400.000		22.000.000		12.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	21.400.000	1	22.000.000	1	12.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						40.000.000		40.000.000		70.000.000		77.000.000		85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	70.000.000	2	77.000.000	2	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10.000.000		15.000.000		16.050.000		16.500.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	2	10.000.000	2	15.000.000	2	16.050.000	2	16.500.000	2	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						30.000.000		30.000.000		32.100.000		35.310.000		38.841.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	32.100.000	3	35.310.000	3	38.841.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						10.000.000		15.000.000		16.050.000		17.173.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.173.000	1	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.500.000		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						15.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	15.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						53.840.000		61.000.000		123.200.000		142.797.000		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	53.840.000	12	61.000.000	12	123.200.000	12	142.797.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						50.000.000		20.000.000		130.000.000		143.000.000		110.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	39	2	50.000.000	2	20.000.000	3	130.000.000	3	143.000.000	3	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						10.000.000		0		30.000.000		30.000.000		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	N/A	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						40.000.000		20.000.000		100.000.000		113.000.000		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	38	5	40.000.000	5	20.000.000	5	100.000.000	5	113.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Disediakan *****														
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						407.405.000		444.745.000		481.375.000		529.511.000		571.757.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	407.405.000	12	444.745.000	12	481.375.000	12	529.511.000	12	571.757.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						10.000.000		10.000.000		5.724.000		6.296.000		6.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.724.000	12	6.296.000	12	6.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						80.000.000		85.600.000		91.592.000		100.751.000		100.751.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	80.000.000	12	85.600.000	12	91.592.000	12	100.751.000	12	100.751.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa						317.405.000		349.145.000		384.059.000		422.464.000		464.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pelayanan Umum Kantor *****																
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	317.405.000	12	349.145.000	12	384.059.000	12	422.464.000	12	464.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						110.000.000		86.000.000		111.000.000		122.100.000		161.550.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	12	9	110.000.000	10	86.000.000	12	111.000.000	11	122.100.000	10	161.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau			3	50.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.500.000	3	66.550.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	3											SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Mebel *****						0		0		11.000.000		0		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	4	N/A	0	N/A	0	2	11.000.000	N/A	0	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						50.000.000		25.000.000		30.000.000		45.100.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	4	1	50.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	4	45.100.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi
		Pemeliharaan /Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						10.000.000		11.000.000		15.000.000		16.500.000		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit	Unit	1	5	10.000.000	5	11.000.000	5	15.000.000	10	16.500.000	10	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA TEGAL, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				asi *****														
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	849.280.000	100	877.350.000	100	1.221.248.000	100	1.343.372.000	100	1.474.586.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	83.940.000	12	85.560.000	12	86.760.000	12	95.436.000	12	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	1	83.940.000	1	85.560.000	1	86.760.000	1	95.436.000	1	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						179.840.000		207.000.000		356.592.000		429.251.000		485.271.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	179.840.000	100	207.000.000	100	356.592.000	100	429.251.000	100	485.271.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						15.000.000		20.000.000		21.400.000		22.000.000		24.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	21.400.000	1	22.000.000	1	24.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						40.000.000		40.000.000		83.892.000		85.000.000		130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	83.892.000	2	85.000.000	2	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10.000.000		10.000.000		16.050.000		16.500.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	2	10.000.000	2	10.000.000	2	16.050.000	2	16.500.000	2	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik						30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kantor *****																
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						10.000.000		10.000.000		16.050.000		17.173.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	16.050.000	1	17.173.000	1	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.500.000		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						15.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	15.000.000	12	30.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						53.840.000		61.000.000		123.200.000		191.078.000		198.261.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	53.840.000	12	61.000.000	12	123.200.000	12	191.078.000	12	198.261.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						50.000.000		30.000.000		150.000.000		130.000.000		120.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	1	1	50.000.000	1	30.000.000	1	150.000.000	1	130.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						10.000.000		0		50.000.000		30.000.000		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	N/A	0	1	50.000.000	N/A	30.000.000	N/A	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						40.000.000		30.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Sarana dan	Jumlah Unit Sarana dan			1	40.000.000	1	30.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	0											SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						425.500.000		453.790.000		516.896.000		566.585.000		616.205.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	425.500.000	12	453.790.000	12	516.896.000	12	566.585.000	12	616.205.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyura *****						10.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		26.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	26.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						90.000.000		96.300.000		103.041.000		113.345.000		113.345.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	12	12	90.000.000	12	96.300.000	12	103.041.000	12	113.345.000	12	113.345.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Disediakan *****														
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						325.500.000		347.490.000		393.855.000		433.240.000		476.564.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	325.500.000	12	347.490.000	12	393.855.000	12	433.240.000	12	476.564.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						110.000.000		101.000.000		111.000.000		122.100.000		161.550.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	19	10	110.000.000	11	101.000.000	12	111.000.000	11	122.100.000	11	161.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.500.000	3	66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Mebel *****						0		0		11.000.000		0		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	8	N/A	0	N/A	0	2	11.000.000	N/A	0	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						50.000.000		40.000.000		30.000.000		45.100.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	50.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	45.100.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						10.000.000		11.000.000		15.000.000		16.500.000		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	7	5	10.000.000	5	11.000.000	5	15.000.000	10	16.500.000	10	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BLORA, OPD Provinsi
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	%	100	100	808.605.000	100	792.457.000	100	1.094.347.000	100	1.234.707.000	100	1.309.942.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral -	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			perangkat daerah	perangkat daerah ***													Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	83.940.000	12	85.560.000	12	86.760.000	12	95.436.000	12	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	1	83.940.000	1	85.560.000	1	86.760.000	1	95.436.000	1	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						179.840.000		207.000.000		341.627.000		375.789.000		448.450.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	179.840.000	100	207.000.000	100	341.627.000	100	375.789.000	100	448.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera						15.000.000		20.000.000		21.400.000		22.000.000		23.540.000	SUB BAGIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		ngan Bangunan Kantor *****															TATA USAHA	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	21.400.000	1	22.000.000	1	23.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						40.000.000		40.000.000		70.000.000		77.000.000		85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	70.000.000	2	77.000.000	2	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10.000.000		15.000.000		16.050.000		16.500.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	3	2	10.000.000	2	15.000.000	2	16.050.000	2	16.500.000	2	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						30.000.000		30.000.000		38.927.000		42.819.000		47.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	38.927.000	3	42.819.000	3	47.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						10.000.000		15.000.000		16.050.000		17.173.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.173.000	1	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.500.000		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						15.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	15.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						53.840.000		61.000.000		123.200.000		142.797.000		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	53.840.000	12	61.000.000	12	123.200.000	12	142.797.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000		20.000.000		130.000.000		143.000.000		110.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		****																
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	18	2	50.000.000	1	20.000.000	2	130.000.000	1	143.000.000	2	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						10.000.000		0		30.000.000		30.000.000		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	N/A	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						40.000.000		20.000.000		100.000.000		113.000.000		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	7	1	40.000.000	1	20.000.000	1	100.000.000	1	113.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						384.825.000		393.897.000		424.960.000		498.382.000		498.382.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	384.825.000	12	393.897.000	12	424.960.000	12	498.382.000	12	498.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						10.000.000		10.000.000		5.724.000		6.296.000		6.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.724.000	12	6.296.000	12	6.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						95.000.000		101.650.000		108.765.000		119.641.000		119.641.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	95.000.000	12	101.650.000	12	108.765.000	12	119.641.000	12	119.641.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						279.825.000		282.247.000		310.471.000		372.445.000		372.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	279.825.000	12	282.247.000	12	310.471.000	12	372.445.000	12	372.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						110.000.000		86.000.000		111.000.000		122.100.000		161.550.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan	Unit	38	10	110.000.000	10	86.000.000	10	111.000.000	10	122.100.000	10	161.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				pemeliharaan ****														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.500.000	3	66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Mebel *****						0		0		11.000.000		0		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	4	N/A	0	N/A	0	2	11.000.000	2	0	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						50.000.000		25.000.000		30.000.000		45.100.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	50.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	45.100.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan						10.000.000		11.000.000		15.000.000		16.500.000		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Lainnya *****																
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	30	5	10.000.000	5	11.000.000	5	15.000.000	10	16.500.000	10	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANYUMAS, OPD Provinsi
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	1.768.838.000	100	1.482.788.000	100	1.791.592.000	100	1.866.914.000	100	2.049.965.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	12	12	83.940.000	12	85.560.000	12	86.760.000	12	95.436.000	12	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	1	83.940.000	1	85.560.000	1	86.760.000	1	95.436.000	1	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						195.840.000		226.920.000		319.017.000		350.918.000		412.930.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral -	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		****															Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	195.840.000	100	226.920.000	100	319.017.000	100	350.918.000	100	412.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						15.000.000		20.000.000		21.400.000		22.000.000		23.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	21.400.000	1	22.000.000	1	23.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						56.000.000		59.920.000		64.114.000		70.525.000		70.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	1	56.000.000	1	59.920.000	1	64.114.000	1	70.525.000	1	70.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10.000.000		15.000.000		16.500.000		16.500.000		18.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	3	3	10.000.000	3	15.000.000	3	16.500.000	3	16.500.000	3	18.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						30.000.000		30.000.000		21.753.000		23.928.000		26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	3	30.000.000	2	30.000.000	2	21.753.000	2	23.928.000	2	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						10.000.000		15.000.000		16.050.000		17.173.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	2	15.000.000	2	16.050.000	2	17.173.000	2	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.500.000		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						15.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	15.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi						53.840.000		61.000.000		123.200.000		143.292.000		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		SKPD *****																
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	53.840.000	12	61.000.000	12	123.200.000	12	143.292.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						485.000.000		350.000.000		580.000.000		530.000.000		710.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	50	15	485.000.000	15	350.000.000	15	580.000.000	20	530.000.000	20	710.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						10.000.000		0		30.000.000		30.000.000		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	10.000.000	N/A	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						475.000.000		350.000.000		550.000.000		500.000.000		700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	50	4	475.000.000	6	350.000.000	8	550.000.000	8	500.000.000	10	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Disediakan *****														
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						294.008.000		320.308.000		344.815.000		355.560.000		374.975.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	294.008.000	12	320.308.000	12	344.815.000	12	355.560.000	12	374.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						10.000.000		10.000.000		5.724.000		11.000.000		6.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.724.000	12	11.000.000	12	6.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						70.000.000		74.900.000		80.143.000		82.390.000		88.157.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	70.000.000	12	74.900.000	12	80.143.000	12	82.390.000	12	88.157.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						214.008.000		235.408.000		258.948.000		262.170.000		280.522.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	214.008.000	12	235.408.000	12	258.948.000	12	262.170.000	12	280.522.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						710.050.000		500.000.000		461.000.000		535.000.000		460.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	209	10	710.050.000	12	500.000.000	15	461.000.000	16	535.000.000	17	460.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pemeliharaan Mebel *****						0		0		11.000.000		0		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	1	11.000.000	1	0	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						300.000.000		150.000.000		100.000.000		80.000.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	300.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	80.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						360.050.000		300.000.000		300.000.000		400.000.000		330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	208	5	360.050.000	5	300.000.000	5	300.000.000	7	400.000.000	8	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi, SEMARANG
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	1.120.440.000	100	1.000.770.000	100	1.268.594.000	100	1.395.452.000	100	1.554.606.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						45.000.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	ESDM Wilayah Semarang - Demak	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun****	Dokumen	12	12	45.000.000	12	85.560.000	12	86.760.000	12	95.436.000	12	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						45.000.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	1	45.000.000	1	85.560.000	1	86.760.000	1	95.436.000	1	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						269.840.000		232.000.000		351.500.000		386.650.000		451.961.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	269.840.000	100	232.000.000	100	351.500.000	100	386.650.000	100	451.961.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						25.000.000		25.000.000		26.750.000		27.500.000		29.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran		1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	26.750.000	1	27.500.000	1	29.425.000	SUB BAGIAN	DEMAK, OPD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			n Bangunan Kantor	gan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket												TATA USAHA	Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						60.000.000		40.000.000		70.000.000		77.000.000		85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	60.000.000	2	40.000.000	2	70.000.000	2	77.000.000	2	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10.000.000		15.000.000		16.050.000		16.500.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	4	2	10.000.000	2	15.000.000	2	16.050.000	2	16.500.000	2	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						50.000.000		30.000.000		32.100.000		35.310.000		38.841.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	5	3	50.000.000	3	30.000.000	3	32.100.000	3	35.310.000	3	38.841.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						15.000.000		20.000.000		21.400.000		22.898.000		23.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	21.400.000	1	22.898.000	1	23.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan						6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.500.000		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Perundang Undangan *****																
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						25.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	25.000.000	12	30.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						78.840.000		66.000.000		129.200.000		149.942.000		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	78.840.000	12	66.000.000	12	129.200.000	12	149.942.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						60.000.000		20.000.000		90.000.000		99.000.000		110.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	11	2	60.000.000	2	20.000.000	3	90.000.000	3	99.000.000	3	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengadaan Mebel *****						10.000.000		0		30.000.000		30.000.000		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	N/A	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						50.000.000		20.000.000		60.000.000		69.000.000		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	10	3	50.000.000	3	20.000.000	3	60.000.000	3	69.000.000	3	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						505.600.000		550.210.000		599.634.000		659.596.000		703.598.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	12	505.600.000	12	550.210.000	12	599.634.000	12	659.596.000	12	703.598.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						10.000.000		10.000.000		10.700.000		11.770.000		11.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.700.000	12	11.770.000	12	11.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi,						165.000.000		176.550.000		188.908.000		207.798.000		207.798.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Sumber Daya Air dan Listrik *****																
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	165.000.000	12	176.550.000	12	188.908.000	12	207.798.000	12	207.798.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						330.600.000		363.660.000		400.026.000		440.028.000		484.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	330.600.000	12	363.660.000	12	400.026.000	12	440.028.000	12	484.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						240.000.000		113.000.000		140.700.000		154.770.000		197.487.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	38	5	240.000.000	5	113.000.000	5	140.700.000	6	154.770.000	6	197.487.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.487.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	2	3	70.000.000	3	77.000.000	3	84.700.000	6	93.170.000	6	102.487.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Mebel *****						0		0		11.000.000		0		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	8	N/A	0	N/A	0	2	11.000.000	N/A	0	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						150.000.000		25.000.000		30.000.000		45.100.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	150.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	45.100.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor						20.000.000		11.000.000		15.000.000		16.500.000		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		atau Bangunan Lainnya *****																
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	27	5	20.000.000	5	11.000.000	5	15.000.000	5	16.500.000	5	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	DEMAK, OPD Provinsi
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	868.952.000	100	841.149.000	100	1.149.855.000	100	1.264.839.000	100	1.333.723.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	1	1	83.940.000	1	85.560.000	1	86.760.000	1	95.436.000	1	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	1	83.940.000	1	85.560.000	1	86.760.000	1	95.436.000	1	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						189.840.000		207.000.000		342.771.000		424.771.000		449.835.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	189.840.000	100	207.000.000	100	342.771.000	100	424.771.000	100	449.835.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						15.000.000		20.000.000		21.400.000		22.000.000		23.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	21.400.000	1	22.000.000	1	23.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						40.000.000		40.000.000		70.000.000		77.000.000		85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	70.000.000	2	77.000.000	2	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10.000.000		15.000.000		16.050.000		16.500.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	2	10.000.000	2	15.000.000	2	16.050.000	2	16.500.000	2	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				yang Disediakan *****														
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						30.000.000		30.000.000		40.071.000		44.078.000		48.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	40.071.000	3	44.078.000	3	48.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						10.000.000		15.000.000		16.050.000		17.173.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.173.000	1	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.500.000		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						15.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	15.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						63.840.000		61.000.000		123.200.000		190.520.000		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	63.840.000	12	61.000.000	12	123.200.000	12	190.520.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						80.000.000		20.000.000		130.000.000		110.377.000		110.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	N/A	80.000.000	1	20.000.000	1	130.000.000	1	110.377.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						10.000.000		0		30.000.000		30.000.000		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	10.000.000	N/A	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						70.000.000		20.000.000		100.000.000		80.377.000		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	N/A	1	70.000.000	1	20.000.000	1	100.000.000	N/A	80.377.000	N/A	100.000.000	SUB BAGIAN	KOTA MAGELANG,

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Lainnya	Lainnya yang Disediakan *****													TATA USAHA	OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						405.172.000		442.589.000		479.324.000		527.255.000		520.778.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	1	405.172.000	1	442.589.000	1	479.324.000	1	527.255.000	1	520.778.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						10.000.000		10.000.000		5.724.000		6.296.000		6.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.724.000	12	6.296.000	12	6.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						70.000.000		74.900.000		80.143.000		88.157.000		88.157.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	70.000.000	12	74.900.000	12	80.143.000	12	88.157.000	12	88.157.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						325.172.000		357.689.000		393.457.000		432.802.000		426.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	325.172.000	12	357.689.000	12	393.457.000	12	432.802.000	12	426.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						110.000.000		86.000.000		111.000.000		107.000.000		161.550.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	19	5	110.000.000	5	86.000.000	6	111.000.000	7	107.000.000	8	161.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	Unit	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.500.000	3	66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Perizinannya *****														
		Pemeliharaan Mebel *****						0		0		11.000.000		0		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	2	11.000.000	N/A	0	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						50.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	50.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						10.000.000		11.000.000		15.000.000		16.500.000		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	15	5	10.000.000	5	11.000.000	5	15.000.000	10	16.500.000	10	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	KOTA MAGELANG, OPD Provinsi
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah ***	%	100	100	766.773.000	100	772.512.000	100	1.101.069.000	100	1.180.247.000	100	1.250.335.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		Administrasi Keuangan						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	Dinas Energi dan Sumber	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Perangkat Daerah ****															Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	1	1	83.940.000	1	85.560.000	1	86.760.000	1	95.436.000	1	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						83.940.000		85.560.000		86.760.000		95.436.000		91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	1	83.940.000	1	85.560.000	1	86.760.000	1	95.436.000	1	91.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						179.840.000		207.000.000		341.626.000		375.788.000		448.450.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	179.840.000	100	207.000.000	100	341.626.000	100	375.788.000	100	448.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						15.000.000		20.000.000		21.400.000		22.000.000		23.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	21.400.000	1	22.000.000	1	23.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						40.000.000		40.000.000		70.000.000		77.000.000		85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	70.000.000	2	77.000.000	2	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10.000.000		15.000.000		16.050.000		16.500.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	3	2	10.000.000	2	15.000.000	2	16.050.000	2	16.500.000	2	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						30.000.000		30.000.000		38.926.000		42.818.000		47.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	38.926.000	3	42.818.000	3	47.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						10.000.000		15.000.000		16.050.000		17.173.000		17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.173.000	1	17.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				*****														
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan *****						6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.500.000		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						15.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	15.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						53.840.000		61.000.000		123.200.000		142.797.000		200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	53.840.000	12	61.000.000	12	123.200.000	12	142.797.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						50.000.000		20.000.000		130.000.000		143.000.000		110.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	40	1	50.000.000	1	20.000.000	1	130.000.000	1	143.000.000	2	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Pengadaan Mebel *****						10.000.000		0		30.000.000		30.000.000		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	1	1	10.000.000	N/A	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						40.000.000		20.000.000		100.000.000		113.000.000		100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	1	1	40.000.000	1	20.000.000	1	100.000.000	1	113.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						342.993.000		373.952.000		431.683.000		443.923.000		438.775.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	12	1	342.993.000	1	373.952.000	1	431.683.000	1	443.923.000	1	438.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						10.000.000		10.000.000		5.724.000		6.296.000		6.297.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.724.000	12	6.296.000	12	6.297.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						78.000.000		83.460.000		89.302.000		98.232.000		98.233.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	78.000.000	12	83.460.000	12	89.302.000	12	98.232.000	12	98.233.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						254.993.000		280.492.000		336.657.000		339.395.000		334.245.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	254.993.000	12	280.492.000	12	336.657.000	12	339.395.000	12	334.245.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						110.000.000		86.000.000		111.000.000		122.100.000		161.550.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	20	7	110.000.000	7	86.000.000	11	111.000.000	7	122.100.000	11	161.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.500.000	3	66.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Pemeliharaan Mebel *****						0		0		11.000.000		0		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	6	N/A	0	N/A	0	2	11.000.000	2	0	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						50.000.000		25.000.000		30.000.000		45.100.000		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	50.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	45.100.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
		Pemeliharaan/ Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						10.000.000		11.000.000		15.000.000		16.500.000		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi *****	Unit	10	5	10.000.000	5	11.000.000	5	15.000.000	10	16.500.000	10	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	BANJARNEGARA, OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah **					**3,1**	**3,11**	**964.421.000**	**3,12**	**1.050.013.000**	**3,13**	**1.260.015.000**	**3,14**	**1.512.017.000**	**3,15**	**1.734.854.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah **	Angka			964.421.000		1.050.013.000		1.260.015.000		1.512.017.000		1.734.854.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						**964.421.000**		**1.050.013.000**		**1.260.015.000**		**1.512.017.000**		**1.734.854.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
			Meningkatnya kualitas perencanaan,	Persentase tingkat ketercapaian		100	100	964.421.000	100	1.050.013.000	100	1.260.015.000	100	1.512.017.000	100	1.734.854.000	Dinas Energi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	kinerja perangkat daerah ***	%												dan Sumber Daya Mineral	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****						964.421.000		1.050.013.000		1.260.015.000		1.512.017.000		1.734.854.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	100	964.421.000	100	1.050.013.000	100	1.260.015.000	100	1.512.017.000	100	1.734.854.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****						684.001.000		752.401.000		902.881.000		1.083.457.000		1.326.802.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	10	5	684.001.000	5	752.401.000	5	902.881.000	5	1.083.457.000	5	1.326.802.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****						171.920.000		189.112.000		226.934.000		272.320.000		299.552.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	18	15	171.920.000	15	189.112.000	15	226.934.000	15	272.320.000	15	299.552.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG, OPD Provinsi
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****						42.500.000		42.500.000		51.000.000		61.200.000		42.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	4	42.500.000	4	42.500.000	4	51.000.000	4	61.200.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****						66.000.000		66.000.000		79.200.000		95.040.000		66.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	2	66.000.000	2	66.000.000	2	79.200.000	2	95.040.000	2	66.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG OPD Provinsi
Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan *								**2.031.349.000**		**2.472.466.000**		**5.314.913.000**		**7.704.844.000**		**9.087.200.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
				Kontribusi PDRB sektor pertambangan *	%	2,19	2,01		2,02		2,03		2,04		2,05		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya penerapan Good Mining Practice (GMP) **							**2.031.349.000**		**2.472.466.000**		**5.314.913.000**		**7.704.844.000**		**9.087.200.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
				Persentase Penerapan		63,37	63,5	2.031.349.000	63,6	2.472.466.000	63,7	5.314.913.000	63,8	7.704.844.000	63,9	9.087.200.000	Dinas Energi dan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Good Mining Practice (GMP) **	%												Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA ***						2.031.349.000		2.472.466.000		5.314.913.000		7.704.844.000		9.087.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah ***	%	72,79	72,9	800.000.000	73	1.039.800.000	73,1	1.800.000.000	73,2	2.000.000.000	73,3	2.500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan Batubara	
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ****						650.000.000		839.800.000		1.600.000.000		1.800.000.000		2.250.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan Batubara	
			Optimalnya layanan usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah ****	Kabupa ten/ Kota	60	35	650.000.000	35	839.800.000	35	1.600.000.000	35	1.800.000.000	35	2.250.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	Batubara	
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****							650.000.000		839.800.000		1.600.000.000		1.800.000.000		2.250.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan Batubara	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah	Laporan	4	5	650.000.000	5	839.800.000	5	1.600.000.000	5	1.800.000.000	5	2.250.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan Batubara	BANJARNEGARA, BANYUMAS, BATANG, Bidang Mineral dan Batubara, BLORA, BOYOLALI, BREBES, CILACAP, DEMAK, GROBOGAN, JEPARA, KARANGANYAR, KEBUMEN, KENDAL, KLATEN, KOTA MAGELANG, KOTA

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****														PEKALONGAN, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA TEGAL, KUDUS, MAGELANG, PATI, PEKALONGAN, PEMALANG, PURBALINGGA, PURWOREJO, REMBANG, SEMARANG, SRAGEN, SUKOHARJO, TEGAL, TEMANGGUNG, WONOGIRI, WONOSOBO
		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan ****						150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan Batubara	
			Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan ****	%	8,33	9,88	150.000.000	9,85	200.000.000	9,8	200.000.000	9,75	200.000.000	9,7	250.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan Batubara	
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan *****						150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam *****	Laporan	2	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan Batubara	BANJARNEGARA, BANYUMAS, BATANG, Bidang Mineral dan Batubara, BLORA, BOYOLALI, BREBES, CILACAP, DEMAK, GROBOGAN, JEPARA, KARANGANYAR, KEBUMEN, KENDAL, KLATEN, KOTA MAGELANG, KOTA PEKALONGAN, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA TEGAL, KUDUS, MAGELANG, PATI, PEKALONGAN, PEMALANG, PURBALINGGA, PURWOREJO, REMBANG, SEMARANG, SRAGEN, SUKOHARJO, TEGAL, TEMANGGUNG, WONOGIRI, WONOSOBO
			Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di	%	60	72,9	107.048.000	73	136.400.000	73,1	354.083.000	73,2	575.400.000	73,3	662.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Wilayah Solo ***													ESDM Wilayah Solo	
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ****						107.048.000		136.400.000		354.083.000		575.400.000		662.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
			Optimalnya layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo ****	Kabupaten/Kota	N/A	5	107.048.000	5	136.400.000	5	354.083.000	5	575.400.000	5	662.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						52.100.000		70.400.000		65.100.000		65.100.000		65.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****																
			Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****	Dokumen	50	13	52.100.000	15	70.400.000	15	65.100.000	15	65.100.000	15	65.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo, KARANGANYAR, KOTA SURAKARTA, SRAGEN
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk						54.948.000		66.000.000		288.983.000		510.300.000		597.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****																
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****	Laporan	43	18	54.948.000	26	66.000.000	67	288.983.000	166	510.300.000	205	597.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo, KARANGANYAR, KOTA SURAKARTA, SRAGEN
			Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria ***	%	68,34	72,9	91.298.000	73	100.300.000	73,1	279.870.000	73,2	463.400.000	73,3	553.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada						91.298.000		100.300.000		279.870.000		463.400.000		553.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ****															Kendeng Muria	
			Optimalnya layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria ****	Kabupa ten/Kot a	N/A	3	91.298.000	3	100.300.000	3	279.870.000	3	463.400.000	3	553.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****						47.600.000		47.600.000		57.600.000		57.600.000		57.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin														

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****	Dokumen	17	10	47.600.000	10	47.600.000	10	57.600.000	10	57.600.000	10	57.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, JEPARA, KUDUS, PATI
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****						43.698.000		52.700.000		222.270.000		405.800.000		495.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha	Laporan	30	9	43.698.000	15	52.700.000	34	222.270.000	115	405.800.000	155	495.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, JEPARA, KUDUS, PATI

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****													
			Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara ***	%	62,35	72,9	85.298.000	73	88.100.000	73,1	270.070.000	73,2	453.600.000	73,3	540.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ****						85.298.000		88.100.000		270.070.000		453.600.000		540.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Optimalnya layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara ****	Kabupaten/ Kota	N/A	3	85.298.000	3	88.100.000	3	270.070.000	3	453.600.000	3	540.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****						46.100.000		46.100.000		56.100.000		56.100.000		56.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1	Dokumen	20	9	46.100.000	9	46.100.000	9	56.100.000	9	56.100.000	9	56.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BATANG, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara, KOTA PEKALONGAN, PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	(Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****														
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****						39.198.000		42.000.000		213.970.000		397.500.000		484.300.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah	Laporan	34	8	39.198.000	10	42.000.000	34	213.970.000	116	397.500.000	154	484.300.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BATANG, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara, KOTA PEKALONGAN, PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****														
			Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan ***	%	62,8	72,9	86.798.000	73	89.600.000	73,1	277.070.000	73,2	463.400.000	73,3	550.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ****						86.798.000		89.600.000		277.070.000		463.400.000		550.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
			Optimalnya layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan ****	Kabupa ten/Kot a	N/A	3	86.798.000	3	89.600.000	3	277.070.000	3	463.400.000	3	550.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan																

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****						47.600.000		47.600.000		57.600.000		57.600.000		57.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****	Dokumen	19	10	47.600.000	10	47.600.000	10	57.600.000	10	57.600.000	10	57.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan, KEBUMEN, PURWOREJO, WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****						39.198.000		42.000.000		219.470.000		405.800.000		492.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	19	8	39.198.000	10	42.000.000	37	219.470.000	119	405.800.000	158	492.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan, KEBUMEN, PURWOREJO, WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			sampai dengan 12 Mil Laut	Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****														
			Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara ***	%	60,46	72,9	92.798.000	73	95.600.000	73,1	277.070.000	73,2	476.000.000	73,3	569.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ****						92.798.000		95.600.000		277.070.000		476.000.000		569.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
			Optimalnya layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara ****	Kabupa ten/Kot a	N/A	4	92.798.000	4	95.600.000	4	277.070.000	4	476.000.000	4	569.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****						47.600.000		47.600.000		57.600.000		59.100.000		59.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****	Dokumen	35	10	47.600.000	10	47.600.000	10	57.600.000	11	59.100.000	11	59.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BREBES, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara, KOTA TEGAL, PEMALANG, TEGAL

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****						45.198.000		48.000.000		219.470.000		416.900.000		510.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****	Laporan	60	12	45.198.000	14	48.000.000	37	219.470.000	125	416.900.000	166	510.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BREBES, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara, KOTA TEGAL, PEMALANG, TEGAL

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan ***	%	79,52	72,9	124.700.000	73	140.000.000	73,1	323.270.000	73,2	523.600.000	73,3	604.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ****						124.700.000		140.000.000		323.270.000		523.600.000		604.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
			Optimalnya layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan ****	Kabupaten/Kota	N/A	3	124.700.000	3	140.000.000	3	323.270.000	3	523.600.000	3	604.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman						47.600.000		52.100.000		65.100.000		68.100.000		80.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****																
			Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****	Dokumen	29	10	47.600.000	13	52.100.000	15	65.100.000	17	68.100.000	25	80.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BLORA, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, GROBOGAN, REMBANG
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam						77.100.000		87.900.000		258.170.000		455.500.000		524.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****																
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****	Laporan	58	32	77.100.000	40	87.900.000	54	258.170.000	141	455.500.000	172	524.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BLORA, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, GROBOGAN, REMBANG
			Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Slamet Selatan	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet	%	73,39	72,9	139.700.000	73	155.000.000	73,1	389.070.000	73,2	621.600.000	73,3	708.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Selatan ***														
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ****							139.700.000		155.000.000		389.070.000		621.600.000		708.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
			Optimalnya layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan ****	Kabupaten/Kota	N/A	2	139.700.000	2	155.000.000	2	389.070.000	2	621.600.000	2	708.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						62.600.000		67.100.000		72.600.000		72.600.000		72.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****																
			Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****	Dokumen	33	20	62.600.000	23	67.100.000	20	72.600.000	20	72.600.000	20	72.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BANYUMAS, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan, CILACAP
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk						77.100.000		87.900.000		316.470.000		549.000.000		635.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****																
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****	Laporan	46	32	77.100.000	40	87.900.000	80	316.470.000	183	549.000.000	221	635.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BANYUMAS, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan, CILACAP
			Terpenuhinya pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah ***	%	100	100	159.815.000	100	252.466.000	100	320.000.000	100	450.644.000	100	500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil ****						159.815.000		252.466.000		320.000.000		450.644.000		500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terpenuhinya realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah ****	%	100	100	159.815.000	100	252.466.000	100	320.000.000	100	450.644.000	100	500.000.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil *****						159.815.000		252.466.000		320.000.000		450.644.000		500.000.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah *****	Dokumen	410	242	159.815.000	244	252.466.000	246	320.000.000	248	450.644.000	250	500.000.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A, Seluruh Kab/Kota di Jawa Tengah, JAWA TENGAH
			Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang - Demak	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak ***	%	63,29	72,9	113.998.000	73	120.700.000	73,1	335.870.000	73,2	561.400.000	73,3	655.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ****						113.998.000		120.700.000		335.870.000		561.400.000		655.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
			Optimalnya layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang - Demak	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak ****	Kabupa ten/Kot a	N/A	6	113.998.000	6	120.700.000	6	335.870.000	6	561.400.000	6	655.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan						55.100.000		55.100.000		65.100.000		66.600.000		66.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		12 Mil Laut *****																
			Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****	Dokumen	48	15	55.100.000	15	55.100.000	15	65.100.000	16	66.600.000	16	66.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak, DEMAK, KENDAL, KOTA SEMARANG
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan						58.898.000		65.600.000		270.770.000		494.800.000		588.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		12 Mil Laut *****																
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****	Laporan	42	20	58.898.000	26	65.600.000	59	270.770.000	159	494.800.000	201	588.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak, DEMAK, KENDAL, KOTA SEMARANG
			Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi ***	%	62,18	72,9	141.798.000	73	157.400.000	73,1	408.670.000	73,2	652.400.000	73,3	690.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan						141.798.000		157.400.000		408.670.000		652.400.000		690.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ****																
			Optimalnya layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi ****	Kabupa ten/Kot a	N/A	4	141.798.000	4	157.400.000	4	408.670.000	4	652.400.000	4	690.200.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****						62.600.000		67.100.000		80.100.000		80.100.000		80.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka	Dokumen	50	20	62.600.000	23	67.100.000	25	80.100.000	25	80.100.000	25	80.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BOYOLALI, Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi, KLATEN, KOTA MAGELANG, MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****														
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****						79.198.000		90.300.000		328.570.000		572.300.000		610.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman	Laporan	50	35	79.198.000	42	90.300.000	85	328.570.000	193	572.300.000	210	610.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BOYOLALI, Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi, KLATEN, KOTA MAGELANG, MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****														
			Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah ***	%	71,29	72,9	88.098.000	73	97.100.000	73,1	279.870.000	73,2	463.400.000	73,3	553.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ****						88.098.000		97.100.000		279.870.000		463.400.000		553.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
			Optimalnya layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di	Kabupa ten/Kot a	N/A	2	88.098.000	2	97.100.000	2	279.870.000	2	463.400.000	2	553.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Wilayah Serayu Tengah ****														
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****								47.600.000		55.100.000		65.100.000		65.100.000		65.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan	Dokumen	10	10	47.600.000	15	55.100.000	15	65.100.000	15	65.100.000	15	65.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	BANJARNEGARA, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah, PURBALINGGA

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				12 Mil Laut *****														
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****								40.498.000		42.000.000		214.770.000		398.300.000		487.900.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah	Laporan	26	9	40.498.000	10	42.000.000	35	214.770.000	116	398.300.000	156	487.900.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			sampai dengan 12 Mil Laut	Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut *****														
Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan *								**2.912.031.000**		**4.265.943.000**		**7.750.800.000**		**11.976.668.000**		**15.747.340.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
				Intensitas Energi Primer *	SBM/ Milliar (Rp)	N/A	203,21		192,72		182,5		172,56		162,86		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer **							**2.912.031.000**		**4.265.943.000**		**7.750.800.000**		**11.976.668.000**		**15.747.340.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
				Porsi EBT dalam bauran energi primer **	%	18,55	21,6	2.912.031.000	21,87	4.265.943.000	22,17	7.750.800.000	22,38	11.976.668.000	22,55	15.747.340.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN ***						2.912.031.000		4.265.943.000		7.750.800.000		11.976.668.000		15.747.340.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah ***	SBM	1014117,4	782,5	630.631.000	1432,65	1.073.500.000	2423,21	1.500.000.000	4063,48	1.800.000.000	5867,75	2.300.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan	
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi ****						522.631.000		965.500.000		1.284.841.000		1.400.000.000		1.800.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan	
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Aneka EBT terbangun di Jawa Tengah	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah ****	Orang	4727	908	522.631.000	1812	965.500.000	3036	1.284.841.000	4548	1.400.000.000	6720	1.800.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah *****						522.631.000		965.500.000		1.284.841.000		1.400.000.000		1.800.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan	
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah *****	Laporan	N/A	1	522.631.000	1	965.500.000	1	1.284.841.000	1	1.400.000.000	1	1.800.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan	BANJARNEGARA, BANYUMAS, BATANG, Bidang Energi Baru Terbarukan, BLORA, BOYOLALI, BREBES, CILACAP, DEMAK, GROBOGAN, JEPARA, KARANGANYAR, KEBUMEN, KENDAL, KLATEN, KOTA MAGELANG, KOTA PEKALONGAN, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA TEGAL, KUDUS, MAGELANG, PATI, PEKALONGAN, PEMALANG, PURBALINGGA, PURWOREJO, REMBANG, SEMARANG, SRAGEN, SUKOHARJO, TEGAL, TEMANGGUNG,

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		WONOGIRI, WONOSOBO
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral ****						108.000.000		108.000.000		215.159.000		400.000.000		500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan	
			Meningkatnya Bangunan Pemerintah yang telah menerapkan konservasi energi	Jumlah Bangunan yang Telah Menerapkan Konservasi Energi ****	Unit	N/A	3	108.000.000	5	108.000.000	5	215.159.000	10	400.000.000	11	500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan	
		Pelaksanaan kegiatan konservasi energi *****						108.000.000		108.000.000		215.159.000		400.000.000		500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi *****	Unit	N/A	3	108.000.000	5	108.000.000	5	215.159.000	10	400.000.000	11	500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan	BANJARNEGARA, BANYUMAS, BATANG, Bidang Energi Baru Terbarukan, BLORA, BOYOLALI, BREBES, CILACAP, DEMAK, GROBOGAN, JEPARA, KARANGANYAR, KEBUMEN, KENDAL, KLATEN, KOTA MAGELANG, KOTA PEKALONGAN, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA TEGAL, KUDUS, MAGELANG, PATI, PEKALONGAN, PEMALANG, PURBALINGGA, PURWOREJO, REMBANG, SEMARANG, SRAGEN, SUKOHARJO, TEGAL, TEMANGGUNG, WONOGIRI, WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo ***	SBM	41915,22	57,46	233.800.000	144,25	321.200.000	286,95	926.800.000	377,25	983.800.000	651,29	1.809.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi ****						213.000.000		29.200.000		204.400.000		525.600.000		941.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Biogas terbangun di Wilayah Solo	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Solo ****	Orang	400	44	213.000.000	4	29.200.000	28	204.400.000	72	525.600.000	160	941.600.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****						213.000.000		29.200.000		204.400.000		525.600.000		941.600.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****	Laporan	68	5	213.000.000	1	29.200.000	7	204.400.000	18	525.600.000	40	941.600.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo, KARANGANYAR, KOTA SURAKARTA, SRAGEN

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi ****						0		271.200.000		691.200.000		416.200.000		826.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Aneka EBT terbangun di Wilayah Solo	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Solo ****	Orang	300	N/A	0	170	271.200.000	320	691.200.000	320	416.200.000	470	826.200.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****						0		271.200.000		691.200.000		416.200.000		826.200.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****	Unit	3	N/A	0	2	271.200.000	4	691.200.000	3	416.200.000	5	826.200.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo, KARANGANYAR, KOTA SURAKARTA, SRAGEN

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral ****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
			Meningkatnya Bangunan Pemerintah yang telah menerapkan konservasi energi di Wilayah Solo	Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Solo ****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan konservasi energi *****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi *****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo, KARANGANYAR, KOTA SURAKARTA, SRAGEN
			Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT)	SBM	90948,94	16,42	87.200.000	109,86	224.200.000	75,44	274.200.000	372,17	779.600.000	567,26	1.125.740.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				terbangun di Wilayah Kendeng Muria ***													Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi ****						66.400.000		58.400.000		116.800.000		175.200.000		204.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Biogas terbangun di Wilayah Kendeng Muria	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria ****	Orang	36	8	66.400.000	8	58.400.000	16	116.800.000	24	175.200.000	28	204.400.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****						66.400.000		58.400.000		116.800.000		175.200.000		204.400.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****	Laporan	7	2	66.400.000	2	58.400.000	4	116.800.000	6	175.200.000	7	204.400.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, JEPARA, KUDUS, PATI

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi ****						0		145.000.000		126.200.000		562.400.000		879.340.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Aneka EBT terbangun di Kendeng Muria	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria ****	Orang	300	N/A	0	150	145.000.000	20	126.200.000	470	562.400.000	770	879.340.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****						0		145.000.000		126.200.000		562.400.000		879.340.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****	Unit	2	N/A	0	1	145.000.000	1	126.200.000	4	562.400.000	6	879.340.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, JEPARA, KUDUS, PATI
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Energi dan Sumber	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral ****															Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
			Meningkatnya Bangunan Pemerintah yang telah menerapkan konservasi energi di Kendeng Muria	Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Kendeng Muria ****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan konservasi energi *****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi *****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, JEPARA, KUDUS, PATI
			Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	132503,5	98,38	333.000.000	120,8	238.200.000	184,21	466.000.000	288,11	728.000.000	560,2	1.279.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				***														
		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi ****						0		71.200.000		284.800.000		284.800.000		284.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Biogas terbangun di Wilayah Serayu Utara	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara ****	Orang	172	N/A	0	20	71.200.000	80	284.800.000	80	284.800.000	80	284.800.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****						0		71.200.000		284.800.000		284.800.000		284.800.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****	Laporan	21	N/A	0	1	71.200.000	4	284.800.000	4	284.800.000	4	284.800.000	SEKSI ENERGI	BATANG, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara, KOTA PEKALONGAN, PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi ****						312.200.000		146.200.000		150.000.000		401.200.000		952.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Aneka EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara ****	Orang	300	170	312.200.000	150	146.200.000	300	150.000.000	190	401.200.000	530	952.400.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****						312.200.000		146.200.000		150.000.000		401.200.000		952.400.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksanany a kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****	Unit	2	2	312.200.000	1	146.200.000	2	150.000.000	3	401.200.000	7	952.400.000	SEKSI ENERGI	BATANG, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara, KOTA PEKALONGAN, PEKALONGAN
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral ****															Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
			Meningkatnya Bangunan Pemerintah yang telah menerapkan konservasi energi di Wilayah Serayu Utara	Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Serayu Utara ****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan konservasi energi *****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi *****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	BATANG, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara, KOTA PEKALONGAN, PEKALONGAN
			Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan ***	SBM	289,74	54,73	164.200.000	163,41	394.400.000	268,97	562.400.000	330,73	1.236.000.000	474,98	1.108.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi ****						143.400.000		102.400.000		241.200.000		372.800.000		361.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Biogas terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan ****	Orang	180	40	143.400.000	24	102.400.000	72	241.200.000	76	372.800.000	96	361.600.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****						143.400.000		102.400.000		241.200.000		372.800.000		361.600.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****	Laporan	9	2	143.400.000	2	102.400.000	6	241.200.000	9	372.800.000	8	361.600.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan, KEBUMEN, PURWOREJO, WONOSOBO
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah						0		271.200.000		290.000.000		821.200.000		705.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		provinsi ****																
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Aneka EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan ****	Orang	N/A	N/A	0	170	271.200.000	300	290.000.000	320	821.200.000	490	705.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****						0		271.200.000		290.000.000		821.200.000		705.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****	Unit	N/A	N/A	0	2	271.200.000	2	290.000.000	5	821.200.000	5	705.000.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan, KEBUMEN, PURWOREJO, WONOSOBO
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		mineral ****																
			Meningkatnya Bangunan Pemerintah yang telah menerapkan konservasi energi di Wilayah Serayu Selatan	Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Serayu Selatan ****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan konservasi energi *****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi *****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan, KEBUMEN, PURWOREJO, WONOSOBO
			Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara***	SBM	91068,05	42,61	148.000.000	191,81	403.200.000	285,25	557.400.000	526,85	711.800.000	559,16	1.134.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi ****						0		71.200.000		71.200.000		213.600.000		356.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Biogas terbangun di Wilayah Slamet Utara	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Slamet Utara ****	Orang	120	N/A	0	20	71.200.000	20	71.200.000	60	213.600.000	100	356.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****						0		71.200.000		71.200.000		213.600.000		356.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****	Laporan	6	N/A	0	1	71.200.000	1	71.200.000	3	213.600.000	5	356.000.000	SEKSI ENERGI	BREBES, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara, KOTA TEGAL, PEMALANG, TEGAL
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam						127.200.000		311.200.000		455.000.000		456.200.000		736.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		wilayah provinsi ****																
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Aneka EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Slamet Utara ****	Orang	150	20	127.200.000	170	311.200.000	320	455.000.000	320	456.200.000	490	736.200.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****						127.200.000		311.200.000		455.000.000		456.200.000		736.200.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****	Unit	1	1	127.200.000	2	311.200.000	3	455.000.000	3	456.200.000	5	736.200.000	SEKSI ENERGI	BREBES, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara, KOTA TEGAL, PEMALANG, TEGAL
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		****																
			Meningkatnya Bangunan Pemerintah yang telah menerapkan konservasi energi di Wilayah Slamet Utara	Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Slamet Utara ****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan konservasi energi *****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi *****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	BREBES, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara, KOTA TEGAL, PEMALANG, TEGAL
			Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan ***	SBM	182071,71	54,73	164.200.000	120,8	237.000.000	190,77	719.800.000	312,61	860.600.000	447,62	1.216.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah						143.400.000		71.200.000		142.400.000		142.400.000		217.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		provinsi ****															ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Biogas terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Kendeng Selatan ****	Orang	200	40	143.400.000	20	71.200.000	40	142.400.000	40	142.400.000	60	217.400.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****						143.400.000		71.200.000		142.400.000		142.400.000		217.400.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****	Laporan	10	2	143.400.000	1	71.200.000	2	142.400.000	2	142.400.000	3	217.400.000	SEKSI ENERGI	BLORA, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, GROBOGAN, REMBANG
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi ****						0		145.000.000		546.200.000		676.200.000		957.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Aneka EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Kendeng Selatan ****	Orang	300	N/A	0	150	145.000.000	170	546.200.000	320	676.200.000	490	957.400.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****						0		145.000.000		546.200.000		676.200.000		957.400.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****	Unit	2	N/A	0	1	145.000.000	3	546.200.000	4	676.200.000	6	957.400.000	SEKSI ENERGI	BLORA, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, GROBOGAN, REMBANG
		Pelaksanan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral ****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya Bangunan Pemerintah yang telah menerapkan konservasi energi di Wilayah Kendeng Selatan	Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Solo ****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan konservasi energi *****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi *****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	BLORA, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, GROBOGAN, REMBANG
			Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan ***	SBM	151285,79	120,8	239.000.000	120,8	237.000.000	256,85	517.400.000	461,3	1.064.200.000	582,1	1.155.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi ****						73.200.000		71.200.000		71.200.000		327.200.000		276.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Biogas terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Slamet Selatan ****	Orang	56	20	73.200.000	20	71.200.000	20	71.200.000	80	327.200.000	80	276.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****						73.200.000		71.200.000		71.200.000		327.200.000		276.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****	Laporan	6	1	73.200.000	1	71.200.000	1	71.200.000	6	327.200.000	5	276.000.000	SEKSI ENERGI	BANYUMAS, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan, CILACAP
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi ****						145.000.000		145.000.000		415.000.000		695.000.000		837.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Aneka EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Slamet Selatan ****	Orang	170	150	145.000.000	150	145.000.000	320	415.000.000	490	695.000.000	640	837.400.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****						145.000.000		145.000.000		415.000.000		695.000.000		837.400.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****	Unit	2	1	145.000.000	1	145.000.000	3	415.000.000	5	695.000.000	6	837.400.000	SEKSI ENERGI	BANYUMAS, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan, CILACAP
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral ****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya Bangunan Pemerintah yang telah menerapkan konservasi energi di Wilayah Slamet Selatan	Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Slamet Selatan ****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan konservasi energi *****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000		
			Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi *****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	BANYUMAS, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan, CILACAP
			Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang - Demak	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang - Demak ***	SBM	41516,02	175,53	467.400.000	178,27	472.600.000	306,74	868.000.000	511,73	1.331.200.000	652,59	1.731.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi ****						300.600.000		306.800.000		518.800.000		686.800.000		496.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang -	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																	Demak	
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Biogas terbangun di Wilayah Semarang - Demak	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Semarang - Demak ****	Orang	508	56	300.600.000	52	306.800.000	90	518.800.000	124	686.800.000	98	496.800.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****						300.600.000		306.800.000		518.800.000		686.800.000		496.800.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****	Laporan	119	8	300.600.000	9	306.800.000	14	518.800.000	19	686.800.000	14	496.800.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak, DEMAK, KENDAL, KOTA SEMARANG
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah						146.000.000		145.000.000		318.000.000		602.400.000		1.192.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		provinsi ****																
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Aneka EBT terbangun di Wilayah Semarang - Demak	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Semarang - Demak ****	Orang	675	150	146.000.000	150	145.000.000	170	318.000.000	470	602.400.000	640	1.192.400.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****						146.000.000		145.000.000		318.000.000		602.400.000		1.192.400.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****	Unit	6	1	146.000.000	1	145.000.000	2	318.000.000	4	602.400.000	7	1.192.400.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak, DEMAK, KENDAL, KOTA SEMARANG
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		mineral ****																
			Meningkatnya Bangunan Pemerintah yang telah menerapkan konservasi energi di Wilayah Semarang - Demak	Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Semarang - Demak ****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan konservasi energi *****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi *****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak, DEMAK, KENDAL, KOTA SEMARANG
			Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi ***	SBM	91206,48	41,05	175.400.000	134,48	319.400.000	255,28	577.200.000	421,43	1.249.734.000	643,86	1.493.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi ****						154.600.000		153.600.000		256.000.000		348.800.000		487.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Biogas terbangun di Wilayah Merapi	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Merapi ****	Orang	188	36	154.600.000	36	153.600.000	60	256.000.000	64	348.800.000	66	487.600.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****						154.600.000		153.600.000		256.000.000		348.800.000		487.600.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****	Laporan	18	3	154.600.000	3	153.600.000	5	256.000.000	10	348.800.000	13	487.600.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut						0		145.000.000		290.000.000		858.934.000		963.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		dalam wilayah provinsi ****																
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Aneka EBT terbangun di Wilayah Merapi	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Merapi ****	Orang	450	N/A	0	150	145.000.000	150	290.000.000	470	858.934.000	660	963.600.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****						0		145.000.000		290.000.000		858.934.000		963.600.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****	Unit	3	N/A	0	1	145.000.000	2	290.000.000	4	858.934.000	7	963.600.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		mineral ****																
			Meningkatnya Bangunan Pemerintah yang telah menerapkan konservasi energi di Wilayah Merapi	Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Merapi ****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan konservasi energi *****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksanany a kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi *****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
			Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah ***	SBM	41403,35	120,8	269.200.000	148,17	345.243.000	312,75	781.600.000	461,3	1.231.734.000	728,69	1.393.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah						103.400.000		179.443.000		460.400.000		350.800.000		397.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		provinsi ****															ESDM Wilayah Serayu Tengah	
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Biogas terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Serayu Tengah ****	Orang	72	24	103.400.000	48	179.443.000	84	460.400.000	68	350.800.000	64	397.600.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****						103.400.000		179.443.000		460.400.000		350.800.000		397.600.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas *****	Laporan	6	2	103.400.000	4	179.443.000	12	460.400.000	9	350.800.000	11	397.600.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi ****						145.000.000		145.000.000		290.000.000		838.934.000		953.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya penerima manfaat dari infrastruktur Aneka EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Serayu Tengah ****	Orang	150	150	145.000.000	150	145.000.000	300	290.000.000	490	838.934.000	660	953.600.000	SEKSI ENERGI	
		Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****						145.000.000		145.000.000		290.000.000		838.934.000		953.600.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksanany a kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT *****	Unit	1	1	145.000.000	1	145.000.000	2	290.000.000	5	838.934.000	7	953.600.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral ****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
			Meningkatnya Bangunan Pemerintah yang telah menerapkan konservasi energi di Wilayah Serayu	Jumlah Hasil Kegiatan Konservasi Energi di Wilayah Serayu Tengah ****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tengah															
		Pelaksanaan kegiatan konservasi energi *****						20.800.000		20.800.000		31.200.000		42.000.000		42.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi *****	Unit	N/A	5	20.800.000	5	20.800.000	10	31.200.000	12	42.000.000	12	42.000.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan *								**2.593.051.000**		**5.006.222.000**		**8.998.573.000**		**10.480.600.000**		**13.407.376.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
				Konsumsi Listrik per Kapita *	KWh/ Kapita	802,05	883,94		945,82		1040,4		1169		1250,83		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Terjaganya ketersediaan daya listrik **							**2.593.051.000**		**5.006.222.000**		**8.998.573.000**		**10.480.600.000**		**13.407.376.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
				Rasio ketersediaan daya listrik **	Angka	1,494	1	2.593.051.000	1	5.006.222.000	1	8.998.573.000	1	10.480.600.000	1	13.407.376.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN ***						2.593.051.000		5.006.222.000		8.998.573.000		10.480.600.000		13.407.376.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah ***	%	65,51	43,02	630.000.000	53,65	811.250.000	64,28	1.050.000.000	74,5	1.500.000.000	74,9	2.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Ketenagalistrikan	
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ****						630.000.000		811.250.000		1.050.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Ketenagalistrikan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Jawa Tengah	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Jawa Tengah ****	%	N/A	97,4	630.000.000	97,5	811.250.000	97,6	1.050.000.000	97,7	1.500.000.000	97,8	2.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Ketenagalistrikan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****						630.000.000		811.250.000		1.050.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Ketenagalistrikan	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****	Laporan	N/A	6	630.000.000	6	811.250.000	6	1.050.000.000	6	1.500.000.000	6	2.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Ketenagalistrikan	BANJARNEGARA, BANYUMAS, BATANG, Bidang Ketenagalistrikan, BLORA, BOYOLALI, BREBES, CILACAP, DEMAK, GROBOGAN, JEPARA, KARANGANYAR, KEBUMEN, KENDAL, KLATEN, KOTA MAGELANG, KOTA PEKALONGAN, KOTA

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		SALATIGA, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA TEGAL, KUDUS, MAGELANG, PATI, PEKALONGAN, PEMALANG, PURBALINGGA, PURWOREJO, REMBANG, SEMARANG, SRAGEN, SUKOHARJO, TEGAL, TEMANGGUNG, WONOGIRI, WONOSOBO
			Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo ***	%	49,81	43,11	268.900.000	53,7	369.672.000	64,3	607.600.000	74,5	557.100.000	74,8	919.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga						22.700.000		30.460.000		44.000.000		52.800.000		57.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Listrik dalam Daerah Provinsi ****																
			Terpenuhinya pelayanan rekomendasi teknis dalam perizinan usaha ketenagalistrikan di Wilayah Solo	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Solo ****	%	100	100	22.700.000	100	30.460.000	100	44.000.000	100	52.800.000	100	57.200.000	SEKSI ENERGI	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****						22.700.000		30.460.000		44.000.000		52.800.000		57.200.000	SEKSI ENERGI	
			Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan	Dokumen	49	11	22.700.000	16	30.460.000	25	44.000.000	31	52.800.000	34	57.200.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo, KARANGANYAR, KOTA SURAKARTA, SRAGEN

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****														
		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi ****						28.700.000		49.500.000		56.100.000		69.300.000		64.900.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
			Meningkatnya Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan di Wilayah Solo	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan ****	%	N/A	43,17	28.700.000	43,19	49.500.000	43,2	56.100.000	43,21	69.300.000	43,22	64.900.000	SEKSI ENERGI	
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						28.700.000		49.500.000		56.100.000		69.300.000		64.900.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		*****																
			Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	49	15	28.700.000	24	49.500.000	33	56.100.000	38	69.300.000	35	64.900.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo, KARANGANYAR, KOTA SURAKARTA, SRAGEN
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ****						217.500.000		289.712.000		507.500.000		435.000.000		797.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksanany a pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang , daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo ****	%	97,39	97,4	217.500.000	97,5	289.712.000	97,6	507.500.000	97,7	435.000.000	97,8	797.500.000	SEKSI ENERGI	
		Pengumpul an dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****						6.000.000		13.500.000		19.500.000		12.000.000		16.500.000	SEKSI ENERGI	
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****	Dokumen	1	1	6.000.000	1	13.500.000	1	19.500.000	1	12.000.000	1	16.500.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo, KARANGANYAR, KOTA SURAKARTA, SRAGEN
		Pembangun an Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang						211.500.000		276.212.000		488.000.000		423.000.000		781.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****																
			Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****	Unit	1298	150	211.500.000	200	276.212.000	350	488.000.000	300	423.000.000	550	781.000.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo, KARANGANYAR, KOTA SURAKARTA, SRAGEN
			Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Kendeng Muria	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Muria ***	%	51,43	43,13	121.896.000	53,75	418.200.000	64,38	647.100.000	74,5	608.700.000	75	964.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia						22.700.000		28.200.000		36.300.000		62.700.000		58.300.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi ****																
			Terpenuhiny pelayanan rekomendasi teknis dalam perizinan usaha ketenagalistri kan di Wilayah Kendeng Muria	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalist rikan di Wilayah Kendeng Muria ****	%	100	100	22.700.000	100	28.200.000	100	36.300.000	100	62.700.000	100	58.300.000	SEKSI ENERGI	
		Penyusunan Rekomenda si Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****						22.700.000		28.200.000		36.300.000		62.700.000		58.300.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksanany a Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomenda si Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****	Dokum en	97	11	22.700.000	15	28.200.000	20	36.300.000	38	62.700.000	35	58.300.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, JEPARA, KUDUS, PATI
		Penatausah aan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi ****						25.700.000		27.500.000		30.800.000		38.500.000		36.300.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
			Meningkatnya Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistri kan di Wilayah Kendeng Muria	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalist rikan (%) ****	%	N/A	43,7	25.700.000	43,71	27.500.000	43,72	30.800.000	43,73	38.500.000	43,75	36.300.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****						25.700.000		27.500.000		30.800.000		38.500.000		36.300.000	SEKSI ENERGI	
			Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	62	13	25.700.000	15	27.500.000	16	30.800.000	18	38.500.000	16	36.300.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, JEPARA, KUDUS, PATI
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ****						73.496.000		362.500.000		580.000.000		507.500.000		870.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksanany a pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang , daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria ****	%	97,39	97,4	73.496.000	97,5	362.500.000	97,6	580.000.000	97,7	507.500.000	97,8	870.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pengumpul an dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****						2.445.000		15.500.000		16.000.000		19.500.000		13.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****	Dokum en	1	1	2.445.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	19.500.000	1	13.000.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, JEPARA, KUDUS, PATI

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****						71.051.000		347.000.000		564.000.000		488.000.000		857.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****	Unit	247	50	71.051.000	250	347.000.000	400	564.000.000	350	488.000.000	600	857.000.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, JEPARA, KUDUS, PATI
			Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Serayu Utara	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Utara ***	%	50,10	43,11	220.400.000	53,71	485.950.000	64,32	666.600.000	74,9	910.100.000	74,92	1.201.976.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga						36.200.000		33.400.000		27.500.000		36.300.000		36.300.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi ****																
			Terpenuhinya pelayanan rekomendasi teknis dalam perizinan usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara ****	%	100	100	36.200.000	100	33.400.000	100	27.500.000	100	36.300.000	100	36.300.000	SEKSI ENERGI	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****						36.200.000		33.400.000		27.500.000		36.300.000		36.300.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksanany a Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomenda si Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****	Dokum en	62	20	36.200.000	18	33.400.000	14	27.500.000	20	36.300.000	20	36.300.000	SEKSI ENERGI	BATANG, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara, KOTA PEKALONGAN, PEKALONGAN
		Penatausah aan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi ****						39.200.000		53.800.000		59.100.000		76.300.000		78.176.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
			Meningkatnya Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistri kan di Wilayah Serayu Utara	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalist rikan (%) ****	%	N/A	43,37	39.200.000	43,38	53.800.000	43,39	59.100.000	43,4	76.300.000	43,42	78.176.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****						39.200.000		53.800.000		59.100.000		76.300.000		78.176.000	SEKSI ENERGI	
			Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	73	22	39.200.000	32	53.800.000	35	59.100.000	43	76.300.000	44	78.176.000	SEKSI ENERGI	BATANG, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara, KOTA PEKALONGAN, PEKALONGAN
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ****						145.000.000		398.750.000		580.000.000		797.500.000		1.087.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksanany a pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang , daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara ****	%	97,39	97,4	145.000.000	97,5	398.750.000	97,6	580.000.000	97,7	797.500.000	97,8	1.087.500.000	SEKSI ENERGI	
		Pengumpul an dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****						4.000.000		19.800.000		16.000.000		16.500.000		13.500.000	SEKSI ENERGI	
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****	Dokumen	1	1	4.000.000	1	19.800.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	13.500.000	SEKSI ENERGI	BATANG, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara, KOTA PEKALONGAN, PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****						141.000.000		378.950.000		564.000.000		781.000.000		1.074.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****	Unit	320	100	141.000.000	275	378.950.000	400	564.000.000	550	781.000.000	750	1.074.000.000	SEKSI ENERGI	BATANG, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara, KOTA PEKALONGAN, PEKALONGAN
			Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Serayu Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Selatan ***	%	49,44	43,13	185.900.000	53,75	334.000.000	64,38	630.300.000	74,5	936.000.000	75	1.080.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga						18.200.000		22.000.000		25.000.000		30.000.000		32.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi ****																
			Terpenuhinya pelayanan rekomendasi teknis dalam perizinan usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan ****	%	100	100	18.200.000	100	22.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	32.000.000	SEKSI ENERGI	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****						18.200.000		22.000.000		25.000.000		30.000.000		32.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksanany a Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomenda si Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****	Dokum en	21	8	18.200.000	11	22.000.000	14	25.000.000	16	30.000.000	17	32.000.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan, KEBUMEN, PURWOREJO, WONOSOBO
		Penatausah aan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi ****						22.700.000		22.000.000		25.300.000		36.000.000		33.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
			Meningkatnya Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistri kan di Wilayah Serayu Selatan	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalist rikan (%) ****	%	N/A	43,7	22.700.000	43,71	22.000.000	43,72	25.300.000	43,73	36.000.000	43,75	33.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****						22.700.000		22.000.000		25.300.000		36.000.000		33.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	27	11	22.700.000	11	22.000.000	13	25.300.000	16	36.000.000	14	33.000.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan, KEBUMEN, PURWOREJO, WONOSOBO
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ****						145.000.000		290.000.000		580.000.000		870.000.000		1.015.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksanany a pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang , daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan ****	%	97,39	97,4	145.000.000	97,5	290.000.000	97,6	580.000.000	97,7	870.000.000	97,8	1.015.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pengumpul an dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****						4.000.000		18.700.000		16.000.000		13.000.000		17.000.000	‘ SEKSI ENERGI	
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****	Dokum en	1	1	4.000.000	1	18.700.000	1	16.000.000	1	13.000.000	1	17.000.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan, KEBUMEN, PURWOREJO, WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****						141.000.000		271.300.000		564.000.000		857.000.000		998.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****	Unit	989	100	141.000.000	200	271.300.000	400	564.000.000	600	857.000.000	700	998.000.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan, KEBUMEN, PURWOREJO, WONOSOBO
			Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Slamet Utara	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Utara ***	%	50,10	43,07	191.900.000	53,67	340.200.000	64,27	646.000.000	74,5	1.108.200.000	74,87	1.251.300.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga						22.700.000		28.200.000		38.500.000		57.200.000		58.300.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi ****																
			Terpenuhinya pelayanan rekomendasi teknis dalam perizinan usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara ****	%	100	100	22.700.000	100	28.200.000	100	38.500.000	100	57.200.000	100	58.300.000	SEKSI ENERGI	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****						22.700.000		28.200.000		38.500.000		57.200.000		58.300.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksanany a Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomenda si Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****	Dokum en	69	11	22.700.000	15	28.200.000	22	38.500.000	34	57.200.000	35	58.300.000	SEKSI ENERGI	BREBES, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara, KOTA TEGAL, PEMALANG, TEGAL
		Penatausah aan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi ****						24.200.000		22.000.000		27.500.000		36.000.000		33.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
			Meningkatnya Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistri kan di Wilayah Slamet Utara	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalist rikan (%) ****	%	N/A	43,29	24.200.000	43,3	22.000.000	43,31	27.500.000	43,32	36.000.000	43,33	33.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****						24.200.000		22.000.000		27.500.000		36.000.000		33.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	40	12	24.200.000	11	22.000.000	14	27.500.000	16	36.000.000	14	33.000.000	SEKSI ENERGI	BREBES, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara, KOTA TEGAL, PEMALANG, TEGAL
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ****						145.000.000		290.000.000		580.000.000		1.015.000.000		1.160.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksanany a pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang , daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara ****	%	97,39	97,4	145.000.000	97,5	290.000.000	97,6	580.000.000	97,7	1.015.000.000	97,8	1.160.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pengumpul an dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****						4.000.000		11.300.000		16.000.000		17.000.000		21.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****	Dokum en	1	1	4.000.000	1	11.300.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	21.000.000	SEKSI ENERGI	BREBES, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara, KOTA TEGAL, PEMALANG, TEGAL

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****						141.000.000		278.700.000		564.000.000		998.000.000		1.139.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****	Unit	1175	100	141.000.000	200	278.700.000	400	564.000.000	700	998.000.000	800	1.139.000.000	SEKSI ENERGI	BREBES, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara, KOTA TEGAL, PEMALANG, TEGAL
			Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan ***	%	49,73	43,1	185.900.000	53,7	479.000.000	64,3	991.500.000	74	1.068.000.000	74,9	1.204.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga						18.200.000		22.000.000		25.000.000		27.000.000		18.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi ****															Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
			Terpenuhiny pelayanan rekomendasi teknis dalam perizinan usaha ketenagalistri kan di Wilayah Kendeng Selatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalist rikan di Wilayah Kendeng Selatan ****	%	N/A	100	18.200.000	100	22.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	18.000.000	SEKSI ENERGI	
		Penyusunan Rekomenda si Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****						18.200.000		22.000.000		25.000.000		27.000.000		18.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****	Dokumen	29	8	18.200.000	11	22.000.000	13	25.000.000	14	27.000.000	8	18.000.000	SEKSI ENERGI	BLORA, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, GROBOGAN, REMBANG
		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi ****						22.700.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		26.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
			Meningkatnya Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%) ****	%	N/A	43,33	22.700.000	43,33	22.000.000	43,33	24.000.000	43,33	26.000.000	43,33	26.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****						22.700.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		26.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	620	11	22.700.000	11	22.000.000	12	24.000.000	10	26.000.000	10	26.000.000	SEKSI ENERGI	BLORA, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, GROBOGAN, REMBANG
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ****						145.000.000		435.000.000		942.500.000		1.015.000.000		1.160.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan ****	%	97,39	97,4	145.000.000	97,5	435.000.000	97,6	942.500.000	97,7	1.015.000.000	97,8	1.160.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****						4.000.000		12.000.000		20.500.000		17.000.000		21.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****	Dokumen	1	1	4.000.000	1	12.000.000	1	20.500.000	1	17.000.000	1	21.000.000	SEKSI ENERGI	BLORA, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, GROBOGAN, REMBANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****						141.000.000		423.000.000		922.000.000		998.000.000		1.139.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****	Unit	1175	100	141.000.000	300	423.000.000	650	922.000.000	700	998.000.000	800	1.139.000.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
			Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan ***	%	49,73	43,11	188.900.000	53,71	368.650.000	64,31	782.000.000	74,5	932.300.000	74,91	1.222.300.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga						21.200.000		23.800.000		33.000.000		36.300.000		36.300.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi ****																
			Terpenuhiny pelayanan rekomendasi teknis dalam perizinan usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan ****	%	N/A	100	21.200.000	100	23.800.000	100	33.000.000	100	36.300.000	100	36.300.000	SEKSI ENERGI	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****						21.200.000		23.800.000		33.000.000		36.300.000		36.300.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****	Dokumen	53	10	21.200.000	12	23.800.000	18	33.000.000	20	36.300.000	20	36.300.000	SEKSI ENERGI	BANYUMAS, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan, CILACAP
		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi ****						22.700.000		18.000.000		24.000.000		26.000.000		26.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
			Meningkatny Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%) ****	%	N/A	43,31	22.700.000	43,32	18.000.000	43,33	24.000.000	43,34	26.000.000	43,35	26.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****						22.700.000		18.000.000		24.000.000		26.000.000		26.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	50	11	22.700.000	8	18.000.000	12	24.000.000	10	26.000.000	10	26.000.000	SEKSI ENERGI	BANYUMAS, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan, CILACAP
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ****						145.000.000		326.850.000		725.000.000		870.000.000		1.160.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan ****	%	97,39	97,4	145.000.000	97,5	326.850.000	97,6	725.000.000	97,7	870.000.000	97,8	1.160.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****						4.000.000		12.350.000		20.000.000		13.000.000		21.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****	Dokumen	1	1	4.000.000	1	12.350.000	1	20.000.000	1	13.000.000	1	21.000.000	SEKSI ENERGI	BANYUMAS, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan, CILACAP

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****						141.000.000		314.500.000		705.000.000		857.000.000		1.139.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****	Unit	1175	100	141.000.000	225	314.500.000	500	705.000.000	600	857.000.000	800	1.139.000.000	SEKSI ENERGI	BANYUMAS, Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan, CILACAP
			Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang Demak ***	%	52,24	42,31	223.400.000	53,26	520.000.000	64,22	841.473.000	75,1	932.400.000	75,14	1.209.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga						36.200.000		41.000.000		60.373.000		65.600.000		57.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi ****																
			Terpenuhinya pelayanan rekomendasi teknis dalam perizinan usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang - Demak	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang - Demak ****	%	N/A	100	36.200.000	100	41.000.000	100	60.373.000	100	65.600.000	100	57.400.000	SEKSI ENERGI	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi*****						36.200.000		41.000.000		60.373.000		65.600.000		57.400.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksanany a Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomenda si Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****	Dokum en	131	20	36.200.000	24	41.000.000	36	60.373.000	40	65.600.000	34	57.400.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak, DEMAK, KENDAL, KOTA SEMARANG
		Penatausah aan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi ****						42.200.000		44.000.000		56.100.000		69.300.000		64.900.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
			Meningkatnya Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistri kan di Wilayah Semarang - Demak	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalist rikan (%) ****	%	N/A	43,04	42.200.000	43,05	44.000.000	43,06	56.100.000	43,07	69.300.000	43,08	64.900.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****						42.200.000		44.000.000		56.100.000		69.300.000		64.900.000	SEKSI ENERGI	
			Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	60	24	42.200.000	26	44.000.000	33	56.100.000	38	69.300.000	35	64.900.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak, DEMAK, KENDAL, KOTA SEMARANG
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ****						145.000.000		435.000.000		725.000.000		797.500.000		1.087.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang - Demak	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang - Demak ****	%	97,39	97,4	145.000.000	97,5	435.000.000	97,6	725.000.000	97,7	797.500.000	97,8	1.087.500.000	SEKSI ENERGI	
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****						4.000.000		12.000.000		20.000.000		16.500.000		13.500.000	SEKSI ENERGI	
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****	Dokumen	1	1	4.000.000	1	12.000.000	1	20.000.000	1	16.500.000	1	13.500.000	SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak, DEMAK, KENDAL, KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****						141.000.000		423.000.000		705.000.000		781.000.000		1.074.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****	Unit	556	100	141.000.000	300	423.000.000	500	705.000.000	550	781.000.000	750	1.074.000.000	‘ SEKSI ENERGI	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak, DEMAK, KENDAL, KOTA SEMARANG
			Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi ***	%	49,98	43,03	188.900.000	53,62	404.300.000	64,21	1.072.000.000	73,7	1.004.800.000	74,7	1.222.300.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta						21.200.000		23.800.000		33.000.000		36.300.000		36.300.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi ****																
			Terpenuhinya pelayanan rekomendasi teknis dalam perizinan usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi ****	%	100	100	21.200.000	100	23.800.000	100	33.000.000	100	36.300.000	100	36.300.000	SEKSI ENERGI	
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****						21.200.000		23.800.000		33.000.000		36.300.000		36.300.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****	Dokumen	58	11	21.200.000	12	23.800.000	18	33.000.000	20	36.300.000	20	36.300.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi ****						22.700.000		18.000.000		24.000.000		26.000.000		26.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
			Meningkatnya Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%) ****	%	N/A	43,12	22.700.000	43,13	18.000.000	43,14	24.000.000	43,15	26.000.000	43,16	26.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****						22.700.000		18.000.000		24.000.000		26.000.000		26.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	42	11	22.700.000	8	18.000.000	12	24.000.000	10	26.000.000	10	26.000.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ****						145.000.000		362.500.000		1.015.000.000		942.500.000		1.160.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi ****	%	97,39	97,4	145.000.000	97,5	362.500.000	97,6	1.015.000.000	97,7	942.500.000	97,8	1.160.000.000	SEKSI ENERGI	
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****						4.000.000		15.500.000		17.000.000		20.500.000		21.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****	Dokumen	1	1	4.000.000	1	15.500.000	1	17.000.000	1	20.500.000	1	21.000.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang						141.000.000		347.000.000		998.000.000		922.000.000		1.139.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****																
			Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang , Daerah Terpencil dan Perdesaan *****	Unit	680	100	141.000.000	250	347.000.000	700	998.000.000	650	922.000.000	800	1.139.000.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
			Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah ***	%	49,14	43,07	186.955.000	53,64	475.000.000	64,21	1.064.000.000	74,7	923.000.000	74,79	1.131.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia						18.200.000		22.000.000		25.000.000		27.000.000		18.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi ****																
			Terpenuhinyp pelayanan rekomendasi teknis dalam perizinan usaha ketenagalistri kan di Wilayah Serayu Tengah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalist rikan di Wilayah Serayu Tengah ****	%	100	100	18.200.000	100	22.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	18.000.000	SEKSI ENERGI	
		Penyusunan Rekomenda si Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****						18.200.000		22.000.000		25.000.000		27.000.000		18.000.000	\ SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi *****	Dokumen	21	8	18.200.000	11	22.000.000	13	25.000.000	14	27.000.000	8	18.000.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi ****						23.755.000		18.000.000		24.000.000		26.000.000		26.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
			Meningkatnya Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan di Wilayah SerayuTengah	Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%) ****	%	N/A	42,81	23.755.000	42,82	18.000.000	42,83	24.000.000	42,84	26.000.000	42,85	26.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****						23.755.000		18.000.000		24.000.000		26.000.000		26.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi *****	Laporan	28	11	23.755.000	8	18.000.000	12	24.000.000	10	26.000.000	10	26.000.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan ****						145.000.000		435.000.000		1.015.000.000		870.000.000		1.087.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah ****	%	97,4	97,5	145.000.000	97,6	435.000.000	97,7	1.015.000.000	97,8	870.000.000	97,9	1.087.500.000	SEKSI ENERGI	
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****						4.000.000		12.000.000		17.000.000		13.000.000		13.500.000	SEKSI ENERGI	
			Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu *****	Dokumen	1	1	4.000.000	1	12.000.000	1	17.000.000	1	13.000.000	1	13.500.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****						141.000.000		423.000.000		998.000.000		857.000.000		1.074.000.000	SEKSI ENERGI	
			Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan *****	Unit	1113	100	141.000.000	300	423.000.000	700	998.000.000	600	857.000.000	750	1.074.000.000	SEKSI ENERGI	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

Visi dan misi pembangunan Jawa Tengah tahun 2025–2029 diwujudkan melalui penetapan 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis, yang secara teknokratis disusun menjadi **"136 Program Daerah"**. Dalam kerangka besar pembangunan ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah memegang peran strategis dalam mendukung implementasi keberhasilan program tersebut, utamanya sebagai penggerak sektor energi dan sumber daya mineral melalui kebijakan pada sektor energi baru terbarukan, ketenagalistrikan, pengelolaan mineral dan batubara, serta konservasi air tanah yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Peran strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam bentuk dukungan nyata melalui berbagai kegiatan, sebagai berikut :

Program Prioritas :

1. Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren
   - Pemberian Bantuan Hibah Infrastruktur EBT (Solar Panel)

Program Aksi:

1. Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C
   - Penyusunan Pergub sebagai turunan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
   - Penyusunan Rekomendasi teknis perizinan Pertambangan.
   - Pengawasan Usaha Pertambangan dan Pelaksanaan Tim Pengawasan Terpadu dalam penerapan *Good Mining Practice*.
2. Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali
   - Pengawasan izin usaha air tanah

Program Intervensi:

3. Pengembangan Destinasi Wisata alam budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah
   - Dieng – Wonosobo :
     a. Peningkatan kapasitas Pengelola Geosite pada Geopark Dieng
     b. Peningkatan kapasitas Pengelola Geosite pada Geopark Dieng
     c. Pelaksanaan Jelajah Geopark
     d. Penguatan mitra ke jaringan geopark Indonesia
   - Geopark Karangsambung - Kebumen :
     a. Peningkatan kapasitas Pengelola Geosite pada Geopark Dieng
     b. Pelaksanaan Jelajah Geopark
   - Geopark Gunung Sewu :
     a. Peningkatan kapasitas Pengelola Geopark

Program Taktis:

1. Program Eco-Pesantren yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi
   - Pemberian Bantuan Hibah Infrastruktur EBT (Solar Panel)
2. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas hidro maupun tenaga surya
   - Pemberian hibah infrastruktur EBT untuk masyarakat
   - Menyusun Revisi Perda terkait Evaluasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi menyesuaikan dengan Revisi PP Kebijakan Energi Nasional (KEN) baru
   - Inventarisasi potensi sumber daya energi untuk pengembangan desa mandiri energi dan Pemberian penghargaan Desa Mandiri Energi
   - Kajian Pengembangan Desa Mandiri Energi
   - Melaksanakan Forum Energi Daerah
3. Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah
   - Pengiriman peserta untuk mengikuti diklat pembentukan PPNS

Adapun Sub Kegiatan Perangkat Daerah urusan energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung program daerah Tahun 2025 – 2029 secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2. Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025 - 2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Aksi: Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C	Penyusunan Pergub sebagai turunan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	1 Dokumen	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara/ Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut / Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) sDaerah Provinsi	1. Bidang Mineral dan Batubara 2. Seluruh Wilayah Cabang Dinas ESDM	Biro Hukum Setda Prov. Jateng; DPUPR; DLHK; DPMPTSP; Satpol PP

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
		Rekomendasi teknis perizinan Pertambangan	156 Dokumen	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara/ Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut / Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Seluruh Wilayah Cabang Dinas ESDM	DPUPR; DLHK; DPMPTSP; DPUPR Kabupaten/ Kota
		Pengawasan Usaha Pertambangan dan Pelaksanaan Tim Pengawasan Terpadu dalam penerapan *Good Mining Practice*	1.798 Laporan	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara/ Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut / Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu)	1. Bidang Mineral dan Batubara 2. Seluruh Wilayah Cabang Dinas ESDM	DPUPR; DLHK; DPMPTSP; DPUPR Kabupaten/ Kota; Satpol PP; Inspektorat; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Biro Hukum Setda Prov. Jateng.

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				sDaerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
2	Program Aksi: Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali	Pengawasan izin usaha air tanah	440 Laporan	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian/ Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi/ Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Seluruh Wilayah Cabang Dinas ESDM	DPUPR, DPMPTSP, Satpol PP, OPD Pendapatan Kabupaten/ Kota
3	Program Intervensi: Pengembangan Destinasi Wisata alam budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah	Dieng – Wonosobo : a. Peningkatan kapasitas Pengelola Geosite pada Geopark Dieng b. Pelaksanaan Jelajah Geopark c. Penguatan mitra ke jaringan geopark Indonesia	3 Kegiatan	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian/ Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi / Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1. Bidang Geologi dan Air Tanah; 2. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah; 3. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	Tim Koordinasi Pengembangan Geopark Jateng (Sekretariat Daerah, Bappeda, DPUPR, BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dinas Komunikasi, Informatika dan Digital)
		Geopark Karangsambung - Kebumen : a. Peningkatan kapasitas Pengelola Geosite pada Geopark Dieng b. Pelaksanaan Jelajah Geopark	2 Kegiatan	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian/ Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi / Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1. Geologi dan Air Tanah; 2. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	Tim Koordinasi Pengembangan Geopark Jateng (Sekretariat Daerah, Bappeda, DPUPR, BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dinas Komunikasi, Informatika dan Digital)
		Geopark Gunung Sewu : Peningkatan kapasitas Pengelola Geopark	1 Kegiatan	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian/ Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi / Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1. Geologi dan Air Tanah; 2. Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	Tim Koordinasi Pengembangan Geopark Jateng (Sekretariat Daerah, Bappeda, DPUPR, BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dinas

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
						Komunikasi, Informatika dan Digital)
4	Program Taktis: Program Eco-Pesantren yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi	Pemberian Bantuan Hibah Infrastruktur EBT (Solar Panel)	57 unit	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan/ Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi/ Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Seluruh Wilayah Cabang Dinas ESDM	Dinas Pendidikan DLHK, DKP
5	Program Taktis: Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas hidro maupun tenaga surya	Pemberian hibah infrastruktur EBT untuk masyarakat	422 unit	1) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan/ Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi/ Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 2) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan/ Kegiatan Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi/ Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Seluruh Wilayah Cabang Dinas ESDM	Dispermasdes, Pemerintah Kab/ Kota
		Menyusun Revisi Perda terkait Evaluasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi menyesuaikan dengan Revisi PP Kebijakan Energi	1 Dokumen	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan/ Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan	Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Bappeda, Disperindag, DLHK, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dispermasdes,

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
		Nasional (KEN) baru		perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi/ Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah		DPMPTSP, Biro Hukum, Biro ISDA/ Biro Bangda Setda Prov. Jateng, Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Inventarisasi potensi sumber daya energi untuk pengembangan desa mandiri energi dan Pemberian penghargaan Desa Mandiri Energi	1 Laporan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan/ Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi/ Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Bappeda, Distanbun, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dispermasdes, DLHK, DinkopUMKM, Biro ISDA/ Biro Bangda Setda Prov. Jateng, Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Kajian Pengembangan Desa Mandiri Energi	1 Laporan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan/ Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi/ Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Bappeda, Disnakkeswan, Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Melaksanakan Forum Energi Daerah	1 Laporan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan/ Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi/ Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Bappeda, Disperindag, DLHK, Dishub, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dispermasdes, DPMPTSP, DPUPR, Disperkim, DKP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif,

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
						Biro Hukum Setda Prov. Jateng, Biro ISDA/ Biro Bangda Setda Prov. Jateng, Biro Perekonomian Setda Prov. Jateng, BRIDA, Pemerintah Kabupaten/ Kota
6	Program Taktis: Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah	Pengiriman peserta untuk mengikuti diklat pembentukan PPNS	6 Orang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi/ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai sesuai dengan kewenangan yang diselenggarakan. Indikator Kinerja Utama menggambarkan tingkat capaian pada tujuan dan capaian pada sasaran. Untuk itu IKU harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesai kegiatan. Selain itu juga ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 disajikan pada Tabel 4.2 dan Penetapan Indikator Kinerja Kunci disajikan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja Utama	*Baseline*		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase penerapan *Good Mining Practice* (GMP) (%)	89,79	63,37	63,4	63,5	63,6	63,7	63,8	63,9	
2	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	15,98	18,55	21,32	21,6	21,87	22,17	22,38	22,55	

No	Indikator Kinerja Utama	*Baseline*		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
3	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	1,52	1,494	1	1	1	1	1	1	
4	Indeks Ketersediaan Air tanah	3,76	3,65	3,66	3,67	3,68	3,69	3,70	3,71	
5	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	76,29	79,68	79,70	79,71	79,72	79,73	79,74	79,75	

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Utama	*Baseline*		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio Elektrifikasi (%)	99,98	99,99	~100	~100	~100	~100	~100	~100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yang dilaksanakan dengan memperhatikan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Renstra ini disusun sehubungan dengan telah terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Tengah secara serentak pada tahun 2024 untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Periode 2025-2030, serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Sebagai implementasi pelaksanaan Renstra, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang, Cabang Dinas dan UPT pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah wajib mempedomani Renstra dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan;
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan terhadap penjabaran Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 setiap tahunnya untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan;
3. Apabila terdapat perubahan regulasi di tingkat pusat maupun daerah, maka dapat dilakukan revisi Renstra sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini serta komitmen semua unsur, maka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan.

LAMPIRAN I
POHON KINERJA-DINAS ESDM
RENSTRA DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

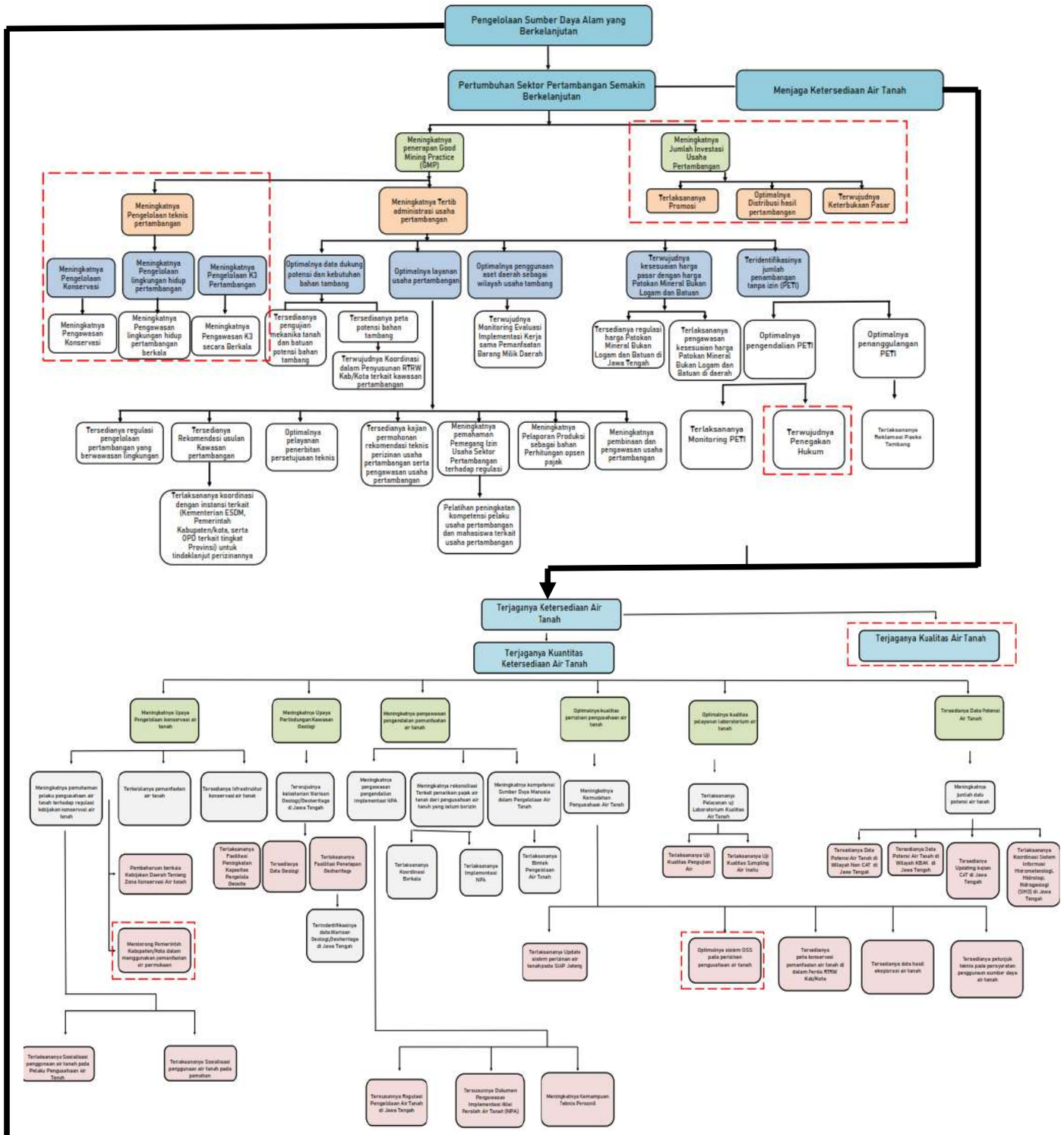

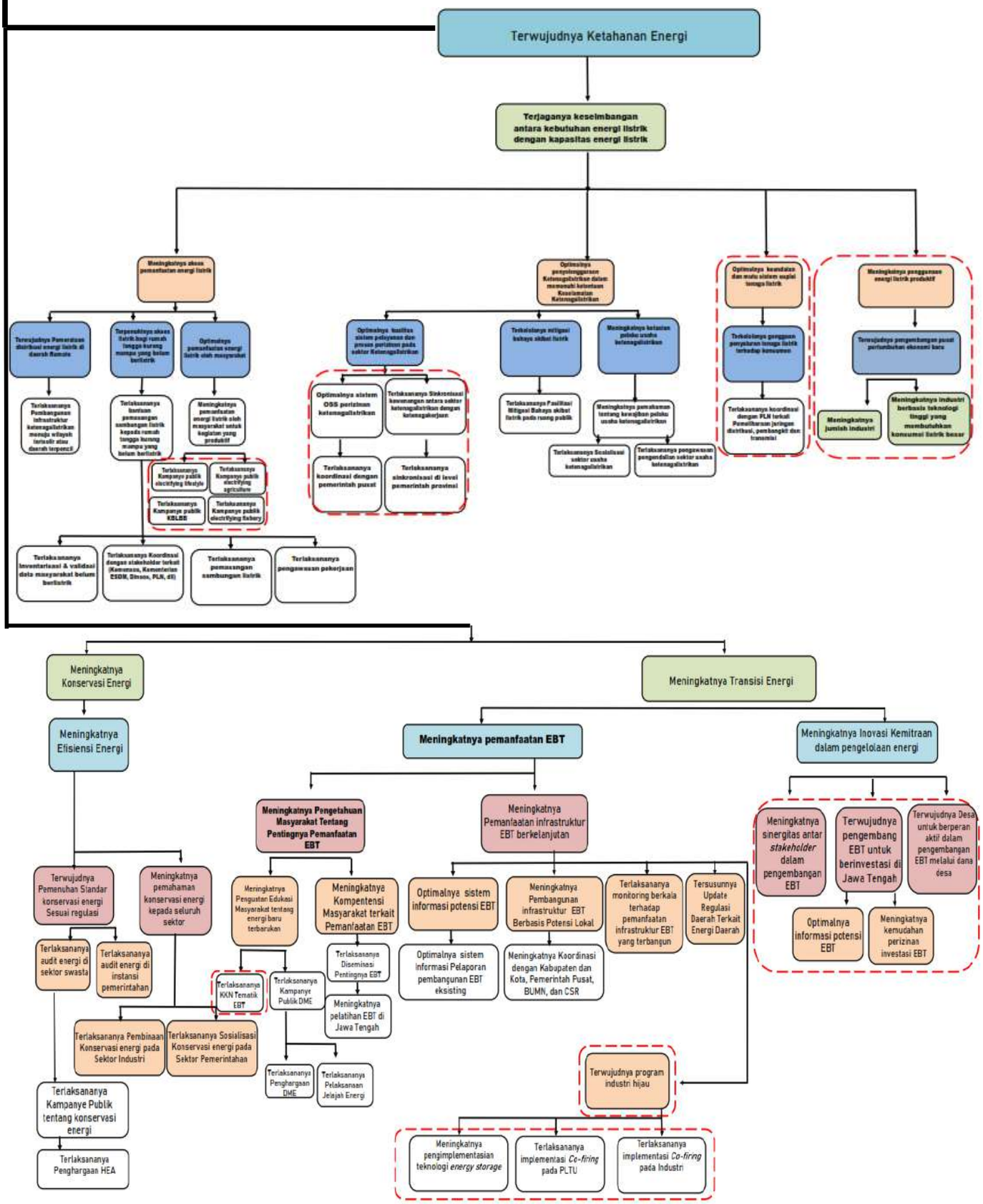
Terwujudnya Ketahanan Energi
Terjaganya keseimbangan antara kebutuhan energi listrik dengan kapasitas energi listrik
Meningkatnya akses pemanfaatan energi listrik
Optimalnya penyelenggaraan Ketenagalistrikan dalam memenuhi ketentuan Keandalan Ketenagalistrikan
Optimalnya kandalan dan mutu sistem supai tenaga listrik
Meningkatnya penggunaan energi listrik produktif
Terwujudnya Pemerataan distribusi energi listrik di daerah Remote
Terpenuhinya akses listrik bagi rumah tangga kurang mampu yang belum berlistrik
Optimalnya pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat
Optimalnya kualitas sistem pelayanan dan proses perizinan pada sektor Ketenagalistrikan
Terlaksanaya mitigasi bahaya akibat listrik
Meningkatnya kelancaran pelaku usaha ketenagalistrikan
Terlaksanaya koordinasi dengan PLN terkait Pemeliharaan jaringan distribusi, pembangkit dan transmisi
Terwujudnya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru
Meningkatnya jumlah industri
Meningkatnya industri berbasis teknologi tinggi yang membutuhkan konsumsi listrik besar
Terlaksanaya Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan menuju wilayah terluar atau daerah terpencil
Terlaksanaya bantuan pemasangan sambungan listrik kepada rumah tangga kurang mampu yang belum berlistrik
Meningkatnya pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat untuk kegiatan yang produktif
Optimalnya sistem OSS perizinan ketenagalistrikan
Terlaksanaya Sinkronisasi kewenangan antara sektor ketenagalistrikan dengan ketenagakerjaan
Terlaksanaya koordinasi dengan pemerintah pusat
Terlaksanaya sinkronisasi di level pemerintah provinsi
Terlaksanaya Fasilitasi Mitigasi Bahaya akibat listrik pada ruang publik
Meningkatnya pemahaman tentang kewajiban pelaku usaha ketenagalistrikan
Terlaksanaya Sosialisasi sektor usaha ketenagalistrikan
Terlaksanaya pengawasan pengendalian sektor usaha ketenagalistrikan
Terlaksanaya Kampanye publik electrifying lifestyle
Terlaksanaya Kampanye publik electrifying agriculture
Terlaksanaya Kampanye publik KBLBB
Terlaksanaya Kampanye publik electrifying fishery
Terlaksanaya inventarisasi & validasi data masyarakat belum berlistrik
Terlaksanaya Koordinasi dengan stakeholder terkait (Kemenass, Kementerian ESDM, Dinsos, PLN, dll)
Terlaksanaya pemasangan sambungan listrik
Terlaksanaya pengawasan pekerjaan
Meningkatnya Konservasi Energi
Meningkatnya Transisi Energi
Meningkatnya Efisiensi Energi
Meningkatnya pemanfaatan EBT
Meningkatnya Inovasi Kemitraan dalam pengelolaan energi
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Pemanfaatan EBT
Meningkatnya Pemanfaatan infrastruktur EBT berkelanjutan
Meningkatnya sinergitas antar stakeholder dalam pengembangan EBT
Terwujudnya pengembang EBT untuk berinvestasi di Jawa Tengah
Terwujudnya Desa untuk berperan aktif dalam pengembangan EBT melalui dana desa
Terwujudnya Pemenuhan Standar konservasi energi Sesuai regulasi
Meningkatnya pemahaman konservasi energi kepada seluruh sektor
Meningkatnya Penguatan Edukasi Masyarakat tentang energi baru terbarukan
Meningkatnya Kompentensi Masyarakat terkait Pemanfaatan EBT
Optimalnya sistem informasi potensi EBT
Meningkatnya Pembangunan infrastruktur EBT Berbasis Potensi Lokal
Terlaksanaanya monitoring berkala terhadap pemanfaatan infrastruktur EBT yang terbangun
Tersusunnya Update Regulasi Daerah Terkait Energi Daerah
Optimalnya informasi potensi EBT
Meningkatnya kemudahan perizinan investasi EBT
Terlaksananya audit energi di sektor swasta
Terlaksananya audit energi di instansi pemerintahan
Terlaksanaya KKN Tematik EBT
Terlaksanaya Kampanye Publik DME
Terlaksanaya Diseminasi Pentingnya EBT
Meningkatnya pelatihan EBT di Jawa Tengah
Optimalnya sistem informasi Pelaporan pembangunan EBT eksisting
Meningkatnya Koordinasi dengan Kabupaten dan Kota, Pemerintah Pusat, BUMN, dan CSR
Terlaksananya Pembinaan Konservasi energi pada Sektor Industri
Terlaksananya Sosialisasi Konservasi energi pada Sektor Pemerintahan
Terlaksanaya Penghargaan DME
Terlaksanaya Pelaksanaan Jelajah Energi
Terwujudnya program industri hijau
Terlaksananya Kampanye Publik tentang konservasi energi
Terlaksanaya Penghargaan HEA
Meningkatnya pengimplementasian teknologi energy storage
Terlaksanaanya implementasi Co-firing pada PLTU
Terlaksanaanya implementasi Co-firing pada Industri

LAMPIRAN II
CASCADING-DINAS ESDM
RENSTRA DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

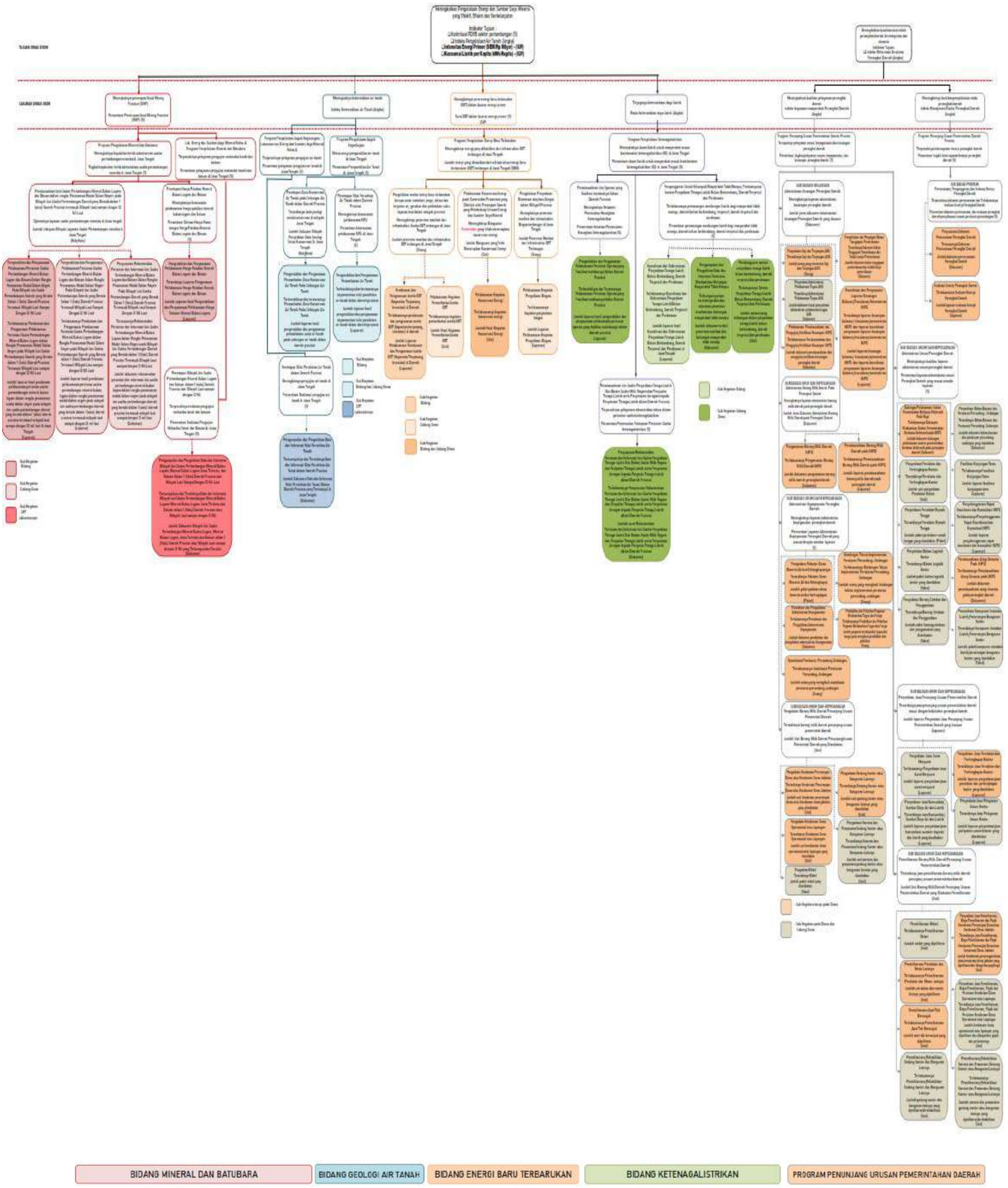

BIDANG MINERAL DAN BATUBARA | BIDANG GEOLOGI AIR TANAH | BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN | BIDANG KETENAGALISTRIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LAMPIRAN III.

MANAJEMEN RISIKO-DINAS ESDM

RENSTRA DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

a. Tabel Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Tujuan:** Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB					
a	Sasaran Strategis	**Sasaran :** Meningkatnya penerapan Good Mining Practice (GMP)	Persentase penerapan Good Mining Practice (GMP)	Kegiatan Pertambangan yang tidak dikelola sesuai Kaidah Pertambangan	Risiko Strategis	1. Adanya potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada suatu wilayah yang belum terakomodir di dalam RTRW Kab./Kota; 2. Tidak tertibnya administrasi usaha pertambangan yang meliputi perizinan, perencanaan,	1. Tidak terwujudnya kaidah pertambangan yang baik dan benar 2. Lahan bekas pertambangan menjadi tidak produktif 3. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup	1. Masyarakat sekitar lokasi penambangan di Kab/kota; 2. Dinas ESDM Prov. Jateng; 3. DLHK Prov. Jateng; 4. Bapenda Prov. Jateng; 5. Pemkab/ Pemkot.

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						pengawasan, pelaporan, dan keselamatan kerja. 3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum/aturan yang berlaku dan rendahnya kepedulian terhadap kelangsungan sumber daya alam.	(kerusakan lingkungan hidup) 4. Tata kelola pertambangan (tertib administrasi) yang baik menjadi tidak tercapai 5. Penerimaan Pajak daerah dari sektor pertambangan tidak maksimal	
				Kegiatan Pertambangan yang tidak dikelola sesuai Kaidah Pertambangan	Risiko Fraud	Pemberian gratifikasi kepada oknum dengan tujuan untuk meminimalisir temuan pelanggaran ketentuan ijin usaha pertambangan.	1. Terjadi kerusakan lingkungan akibat penambang tidak menerapkan kaidah GMP; 2. Semakin banyak potensi pajak sektor pertambangan yang tidak terbayarkan.	1. Masyarakat sekitar lokasi penambangan di Kab/kota; 2. Dinas ESDM Prov. Jateng; 3. DLHK Prov. Jateng; 4. Bapenda Prov. Jateng; 5. Pemkab/ Pemkot
				Pemanfaatan lahan di gunung ragas tidak memenuhi kaidah GMP	Risiko Kemitraan	Laporan produksi tidak sesuai dengan jumlah produksi yang sesungguhnya	Tidak tercapainya target PAD dari sewa lahan Gunung Ragas	1. Dinas ESDM Prov. Jateng 2. Pemprov. Jateng
1)	Sasaran Program	**Program:** Pengelolaan Mineral dan Batubara	1. Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah 2. Tingkat kepatuhan tertib administrasi	Masih terdapat pengambilan sumber daya alam/ penambangan tanpa izin	Risiko Kepatuhan	1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum/aturan yang berlaku, rendahnya kesadaran pelaku penambangan ilegal untuk mengajukan	1. Munculnya konflik sosial di sekitar wilayah kegiatan penambangan illegal 2. Semakin meningkatnya kerusakan lingkungan bekas	1. Masyarakat sekitar lokasi penambangan di Kab/kota 2. Inspektur Tambang (Kementerian ESDM)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria 3. Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan 4. Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi			izin, dan rendahnya kepedulian terhadap kelangsungan sumber daya alam 2. Belum optimalnya penindakan hukum bagi pelaku PETI 3. Adanya potensi mineral bukan logam dan batuan yang tidak diakomodir dalam tata ruang kabupaten	lokasi pertambangan tanpa izin, karena aktifitas penambangan ilegal tidak menerapkan asas Good Mining Practice 3. Semakin banyak potensi pajak sektor pertambangan yang tidak terbayarkan 4. Kerusakan infrastruktur di sekitar wilayah kegiatan penambangan ilegal	3. BBWS (Kementerian PU PR) 4. Kementerian LHK 5. Dinas ESDM Prov. Jateng 6. DLHK Prov. Jateng 7. Bapenda Prov. Jateng 8. Pusdataru 9. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng 10. DPMPTSP Prov. Jateng 11. Pemkab/ Pemkot 12. Masyarakat
			5. Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak 6. Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan 7. Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha	Masih adanya pelaku izin usaha pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi tata tertib administrasi	Risiko Kepatuhan	1. Usaha Pertambangan tidak tertib administrasi dalam pelaporan produksi pertambangan 2. Pelaku usaha penambangan tidak melaksanakan petunjuk dan arahan dari hasil inspeksi, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku pertambangan berijin dalam menerapkan sistem penambangan yang baik dan benar	Penerimaan Pajak daerah dari sektor pertambangan tidak maksimal	Pemprov Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah 8. Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara 9. Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di			3. Masih adanya izin usaha pertambangan yang belum memiliki tenaga teknis yang berkompeten		

			Wilayah Sewu Lawu 10. Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan 11. Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara 12. Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo 13. Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo	Pemanfaatan lahan di gunung ragas untuk meningkatkan PAD tidak berjalan baik atau kerja sama berhenti sebelum masa kontrak selesai	Risiko Kemitraan	1. Perjanjian kerjasama menghendaki adanya kenaikan kontribusi setiap tahunnya 2. Pemasaran feldspar yang semakin banyak tantangan terutama pesaing dari produk import (harga lebih murah) 3. Belum ada pabrik keramik di Jawa Tengah sehingga harga feldspar dari gunung ragas menjadi lebih mahal dijual ke luar wilayah Jawa Tengah	1. Tidak tercapainya target PAD dari sewa lahan Gunung Ragas 2. PT Semarang Mineral Pembangunan semakin sulit memenuhi target PAD yang tertuang di dalam kontrak dan ada kemungkinan dari perusahaan tidak meneruskan kerja sama dimaksud atau dari pihak pemda memutus kerja sama karena perusahaan tidak dapat memenuhi target PAD lagi 3. Dengan berhentinya kegiatan pertambangan feldspar mengakibatkan juga pemutusan hubungan kerja dengan tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari Desa di lokasi tambang	1. Dinas ESDM Prov. Jateng 2. PT Semarang Mineral Pembangunan 3. Masyarakat sekitar tambang

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a)	Sasaran Kegiatan	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Masih adanya perbedaan harga jual mineral bukan logam dan batuan oleh pelaku usaha pertambangan	Risiko Operasional	Tidak kepatuhan pelaku usaha pertambangan terhadap HPM yang telah ditetapkan	Persaingan harga dan ketidaksesuaian besaran pajak penjualan komoditas tambang	1. Masyarakat dan para pelaku usaha 2. Bapenda PemProv. Jateng 3. Instansi pengelola keuangan Kab./Kota
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	Durasi waktu proses penerbitan persetujuan teknis perizinan berusaha di bidang pertambangan yang cukup panjang	Risiko Kebijakan	1. tumpang tindih regulasi antar sektor (tata ruang, kehutanan, lingkungan, wilayah sungai, dsb) 2. Aplikasi perizinan (OSS) belum sempurna	Terhambatnya perizinan pertambangan	1. Dinas ESDM Prov. Jateng 2. DPMPTSP Prov. Jateng 3. Pelaku usaha pertambangan
				Adanya penolakan warga atas kegiatan usaha pertambangan	Risiko Operasional	Pelaku usaha tambang tidak menerapkan good mining practice	Munculnya aduan masyarakat	Dinas ESDM Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Pemberian ijin usaha tambang yang melanggar kaidah/etik/SOP	Risiko Fraud	pemberian gratifikasi kepada oknum dengan tujuan untuk mempermudah perizinan dan menghilangkan temuan	1. Menurunkan integritas pegawai dan instansi 2. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas instansi Pemerintah	Dinas ESDM Prov. Jateng
2)	Sasaran Program	**Program:** Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	Munculnya aduan/ keluhan dari pengguna layanan	Risiko Operasional	1. Penyelesaian layanan melebihi batas waktu pada SOP 2. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM layanan 3. Sarana prasarana pengujian yang tidak berfungsi optimal	Menurunnya Tingkat Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Pengujian Mekanika Tanah dan Batuan.	Dinas ESDM Prov Jateng
b)	Sasaran Kegiatan	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan	Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	Masih rendahnya tingkat kepercayaan pengguna jasa uji laboratorium ESDM dengan metode uji yang dilakukan	Risiko Operasional	1. Laboratorium belum sertifikasi akreditasi oleh Badan Standarisasi Nasional 2. Masih rendahnya pemahaman pengguna jasa terhadap SOP pengujian	Kehilangan pelanggan / pengguna jasa	Dinas ESDM Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Proses Pengujian Mekanika Tanah dan Batuan serta Analisa Kimia Tanah dan Batuan tidak sesuai SOP	Risiko Fraud	Potensi adanya pemberian / gratifikasi dari pemohon / pengguna jasa saat mengajukan pengujian	1. Menurunkan integritas pegawai dan instansi 2. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas instansi Pemerintah	Dinas ESDM Prov. Jateng
				Adanya kecelakaan kerja akibat pengoperasian alat pengujian mekanika	Risiko Operasional	Kurangnya konsistensi dan kesadaran analis dalam menggunakan APD saat proses analisa pengujian.	1. Analis berpotensi mengalami cidera/ cacat fisik/ gangguan kesehatan lain 2. Tidak tercapainya target SOP pengujian karena proses pengujian terhenti untuk recovery kesehatan analis	Dinas ESDM Prov. Jateng
				Paparan Radiasi akibat pengoperasian alat dengan Sumber Radiasi Pengion	Risiko Operasional	Intensitas operator yang berlebih dalam mengoperasikan alat Sumber Radiasi Pengion	Analis berpotensi mengalami kerusakan jaringan tubuh	Dinas ESDM Prov. Jateng
2.		**Tujuan:** Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien	Indeks Pengelolaan Air Tanah					

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dan Berkelanjutan						
a.	Sasaran Strategis	**Sasaran :** Meningkatnya ketersediaan air tanah	**Indeks Ketersediaan Air tanah**	Terjadinya Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah	Risiko Strategis	1. Masyarakat belum paham terhadap regulasi air tanah; 2. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang bersumber dari air permukaan; 3. Keengganan masyarakat dan pelaku usaha pengguna air tanah untuk mengurus perijinan air tanah; 4. Kurang pedulinya masyarakat/ pemanfaat air tanah terhadap kelangsungan Sumber Daya Alam	1. Pinsip konservasi air tanah tidak tercapai, sehingga terjadinya kerusakan lingkungan air tanah; 2. Penerimaan Pajak air tanah tidak maksimal; 3. Pengambilan Air Tanah tanpa izin sering memicu konflik horisontal sesama pengguna air tanah	1. Dinas ESDM Prov. Jateng; 2. DLHK Prov. Jateng; 3. Bapenda Prov. Jateng; 4. Pemkab/Pemkot; 5. Masyarakat
				Terjadinya land subsidence (penurunan muka air tanah)	Risiko Strategis	Pengambilan air tanah yang berlebihan	1. Kerusakan bangunan dan infrastruktur 2. Peningkatan risiko banjir di daerah dataran rendah 3. Kerusakan permanen pada akuifer air	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2. Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							tanah dan ekosistem perairan	
1)	Sasaran Program	**Program:** Pengelolaan Aspek Kegeologian	1. Persentase pengambilan air tanah 2. Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria 3. Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan 4. Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi 5. Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak 6. Persentase pengambilan air	Pengambilan air tanah tanpa ijin yang masih dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha	Risiko Kepatuhan	1. Masyarakat belum paham terhadap regulasi air tanah 2. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat dari air permukaan 3. Keengganan masyarakat dan pelaku usaha pengguna air tanah untuk mengurus perijinan air tanah 4. Kurang pedulinya masyarakat/ pemanfaat air tanah terhadap kelangsungan Sumber Daya Alam 5. Dinamika regulasi pada sektor pengelolaan air tanah	1. Prinsip konservasi air tanah tidak tercapai, sehingga terjadinya kerusakan lingkungan air tanah 2. Penerimaan Pajak air tanah tidak maksimal 3. Pengambilan Air Tanah tanpa izin sering memicu konflik horisontal sesama pengguna air tanah	1. Dinas ESDM Prov. Jateng, 2. DLHK Prov. Jateng, 3. DPMPTSP Prov. Jateng, 4. Pemkab/Pemkot, 5. Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			tanah Wilayah Serayu Selatan 7. Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah 8. Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara 9. Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu 10. Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan 11. Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara 12. Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo 13. Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo 14. Persentase pelayanan pengujian air tanah	Adanya pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan/ pemakaian air tanah (Pelanggaran terhadap debit pengambilan air tanah yang diijinkan)	Risiko Kepatuhan	1. Masyarakat belum paham terhadap regulasi air tanah 2. Kurangnya pemahaman para pengguna air tanah terutama yang berskala besar terhadap prinsip konservasi sumber daya air (air tanah) 3. Peningkatan kebutuhan air tanah disebabkan sumber air alternatif belum tersedia; 4. Adanya stigma bahwa biaya pemanfaatan air tanah lebih murah apabila dibandingkan dengan sumber air yang lain	Prinsip konservasi air tanah tidak tercapai, sehingga terjadi kerusakan lingkungan air tanah	1. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng; 2. Kepala Bidang GAT; 3. Kepala Cabang Dinas ESDM 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5. Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a)	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Data Geologi Untuk Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi	Jumlah cakupan wilayah penyediaan data geologi di Jawa Tengah	Terjadinya bencana geologi di daerah rawan bencana geologi yang menimbulkan korban / kerugian	Risiko Strategis	1. Karakteristik wilayah yang rawan bencana geologi 2. Okupansi lahan pada daerah rawan bencana geologi oleh aktivitas permukiman warga	Bencana geologi yang mengakibatkan korban/kerugian	1. Kepala Daerah, 2. Masyarakat 3. Dinas ESDM Prov. Jateng 4. BPBD Prov/Kab/Kota
				Pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah belum memanfaatkan data dan informasi geologi	Risiko Operasional	Penyediaan data dan informasi yang belum optimal.	Kerusakan infrastruktur di wilayah rawan bencana geologi	1. Kepala Daerah, 2. Masyarakat 3. Dinas ESDM Prov. Jateng 4. BPBD Prov/Kab/Kota 5. DLHK Kab./Kota 6. PU PR Kab./Kota

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah	Pelaku usaha mengambil air tanah dengan debit yang berlebihan	Risiko Fraud	Terdapat oknum yang menerima suap untuk laporan volume debit air yang diambil tidak sesuai yang semestinya	1. Menurunkan integritas pegawai dan instansi 2. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas instansi Pemerintah 3. Dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penggunaan air tanah berlebihan	Dinas ESDM Prov. Jateng
				Masih ada pengguna air tanah yang belum melaporkan volume penggunaan air tanah	Risiko Kepatuhan	Pengguna air tanah skala kecil yang belum memahami kewajiban pelaporan dalam penggunaan volume air tanahnya	Perhitungan volume pengambilan air tanah kurang akurat	1. Dinas ESDM Prov. Jateng 2. Masyarakat
				Masih terdapat pemerintah kab./kota yang melakukan penarikan pajak air tanah tidak sesuai dengan perhitungan NPA	Risiko Kepatuhan	Masih terdapat penggunaan air tanah yang tidak berizin dan / atau tidak memasang meteran air, dihitung flat	Pendapatan daerah tidak optimal	Instansi yang menangani pendapatan daerah di Kabupaten/Kota

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pelaku usaha menggunakan air tanah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Risiko Fraud	Terdapat oknum yang menerima suap/ gratifikasi untuk memberikan rekomendasi teknis tidak sesuai ketentuan	Kerusakan lingkungan dikarenakan ada pengambilan air tanah yang berlebihan	Dinas ESDM Prov. Jateng
2)	Sasaran Program	**Program:** Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	Munculnya aduan/ keluhan dari pengguna layanan	Risiko Operasional	1. Penyelesaian layanan melebihi batas waktu pada SOP 2. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM layanan 3. Sarana prasarana pengujian yang tidak berfungsi optimal	Menurunnya Tingkat Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	Dinas ESDM Prov. Jateng
a)	Sasaran Kegiatan	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah	Berkurangnya jumlah wilayah pengujian air tanah yang menjadi kewenangan provinsi	Risiko Kebijakan	1. Adanya perubahan regulasi kewenangan perizinan air tanah yang berdasarkan wilayah sungai; 2. Adanya perubahan persyaratan lampiran pemantauan kualitas air tanah yang semula setiap tiga bulan sekali menjadi 6 bulan sekali dalam satu tahun terakhir masa izin	Tidak tercapainya Target PAD untuk pengujian air Laboratorium ESDM	Dinas ESDM Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Adanya kecelakaan kerja saat proses analisa pengujian air	Risiko Operasional	Kurangnya konsistensi dan kesadaran analis dalam menggunakan APD saat proses analisa pengujian	1. Analis berpotensi mengalami cidera/ cacat fisik/ gangguan kesehatan lain 2. Tidak tercapainya target SOP pengujian karena proses pengujian terhenti untuk recovery kesehatan analis	Dinas ESDM Prov. Jateng
3		**Tujuan :** Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan	Intensitas Energi Primer					

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	Sasaran Strategis	**Sasaran :** Meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Lambatnya pertumbuhan EBT di Jawa Tengah yang berpengaruh pada besaran porsi EBT dalam Bauran Energi	Risiko Strategis	1. Infrastruktur EBT yang terbangun tidak termanfaatkan secara optimal; 2. Energi fosil mudah diperoleh.	1. Tidak tercapainya target bauran energi secara regional maupun nasional 2. Pemanasan global dan perubahan iklim	1. Dinas ESDM Prov. Jateng; 2. Masyarakat.
				Masyarakat/ industri/ instansi terkendala dalam membangun PLTS atap	Risiko Kebijakan	Adanya pembatasan kuota pembangunan PLTS Atap sesuai Permen ESDM No 2 Tahun 2024	Tidak tercapainya target bauran energi secara regional maupun nasional	1. Dinas ESDM Prov. Jateng; 2. Masyarakat.

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1)	Sasaran Program	**Program :** Pengelolaan Energi Terbarukan	1. Energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah 2. Energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria 3. Energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan 4. Energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi 5. Energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang Demak 6. Energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan 7. Energi yang dihasilkan dari	Masyarakat kembali menggunakan energi konvensional	Risiko operasional	1. Penerima manfaat tidak mampu menjaga aset dan melakukan pemeliharaan 2. Penerima manfaat tidak menggunakan Infrastruktur EBT sesuai prosedur	1. Infrastruktur EBT tidak dapat berfungsi secara optimal 2. Tidak tercapaianya target persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi 3. Masyarakat tidak mendapatkan sumber energi alternatif dengan biaya yang lebih murah	Dinas ESDM Prov.Jateng dan Masyarakat
				Tidak tercapainya target pengembangan energi surya dan transisi energi	Risiko kemitraan	adanya wanprestasi dari lembaga think thak (IESR) dan Dinas ESDM dalam melaksanakan program kerja pengembangan energi surya dan transisi energi	Tidak tercapaianya target persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi dan tidak tercapainya transisi energi.	Dinas ESDM Prov.Jateng dan Masyarakat
				Masyarakat kembali menggunakan energi konvensional	Risiko operasional	1. Penerima manfaat tidak mampu menjaga aset dan melakukan pemeliharaan 2. Penerima manfaat tidak menggunakan Infrastruktur EBT sesuai prosedur 3. Spesifikasi teknis tidak sesuai dengan Juknis	1. Infrastruktur EBT tidak dapat berfungsi secara optimal 2. Tidak tercapaianya target persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi 3. Masyarakat tidak mendapatkan	Dinas ESDM Prov.Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah 8. Energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara 9. Energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Sewu Lawu 10. Energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan 11. Energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara 12. Energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo 13. Energi yang dihasilkan dari infrastruktur				sumber energi alternatif dengan biaya yang lebih murah	

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EBT terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo					
a)	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Konservasi Energi pada Sarana dan Prasarana yang Dikelola oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Bangunan yang Telah Menerapkan Konservasi Energi D45:I45	Usulan nominatif penerima penghargaan DME dan HEA tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh panitia	Risiko Operasional	1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan Cabang Dinas dan Pemkab/Pemkot terkait penjaringan obyek 2. Kurangnya waktu yang dibutuhkan untuk persiapan administrasi dan implementasi penilaian DME dan HEA 3. Sistem aplikasi pendaftaran (SIAP EBT) yang belum maksimal atau kesulitan dalam penggunaanya 4. Kurangnya minat desa, industri dan instansi pemerintah untuk mengikuti penghargaan DME dan HEA	1. Tidak tercapainya target/indikator kinerja Bidang EBT 2. Desa tidak mandiri energi 3. Inovasi terkait DME dan HEA di daerah yang tidak terapresiasi dan terpublikasi akibat tidak tersampaikannya informasi	Masyarakat dan Dinas ESDM Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengusulan kuota BBM/ LPG Bersubsidi tidak tepat sasaran	Risiko Operasional	Pengusulan kuota BBM dan LPG Bersubsidi oleh Kabupaten/ Kota tidak disertai dengan dasar perhitungan yang akurat	Kuota BBM dan LPG Bersubsidi yang tidak tepat sasaran.	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2. Pemerintah Kab/Kota 3. Masyarakat
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	Terdapat potensi EBT di desa yang belum dimanfaatkan	Risiko Operasional	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Desa 2. Keterbatasan anggaran desa untuk pembangunan infrastuktur EBT	1. Tidak tercapaianya target persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi 2. Masih tingginya emisi tCO2 dari penggunaan energi fosil	1. Provinsi Jawa Tengah 2. Dinas ESDM Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi		Desa yang memiliki potensi biogas dan telah terbangun digester biogas, tidak memanfaatkan EBT	Risiko kemitraan	Yayasan Rumah Energi tidak melakukan pendampingan teknis pengembangan biogas dengan baik (wanprestasi)	Masyarakat desa kembali memanfaatkan energi fosil dan masyarakat tidak mendapatkan sumber energi alternatif dengan biaya yang lebih murah	Dinas ESDM Prov. Jateng dan Masyarakat
		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun	Resistensi masyarakat atas pembangunan Infrastruktur EBT di dekat lingkungan	Risiko Operasional	1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait EBT 2. Kekhawatiran masyarakat bahwa infrastruktur EBT yang terbangun akan terbengkalai	1. Tidak tercapainya target pembangunan EBT 2. Menimbulkan konflik sosial	1. Cabang Dinas ESDM Prov. Jateng 2. Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Terdapat monopoli dalam pemilihan penyedia/tidak transparan dan kurangnya efisiensi anggaran	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima suap/gratifikasi dari penyedia barang/jasa sebagai bentuk kemitraan	Pelanggaran hukum	Dinas ESDM Prov. Jateng
		Tujuan: Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan	Konsumsi Listrik per Kapita			3.	3.	3.

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b)	Sasaran Strategis	**Sasaran :** Terjaganya ketersediaan daya listrik	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Distribusi listrik yang belum merata	Risiko Strategis	Ketersediaan daya listrik di Jawa Tengah oversupply	menghambat transisi energi dan pengembangan infrastruktur EBT	1. Dinas ESDM Prov.Jateng; 2. Masyarakat.
				Terjadinya bencana kebakaran karena instalasi listrik dari pembangkitan	Risiko Operasional	1. Keandalan pasokan listrik PLN yang kurang stabil yang memicu penggunaan energi listrik non PLN sebagai energi cadangan; 2. Masyarakat kurang memahami keselamatan ketenagalistrikan.	Kerugian secara material dan adanya korban jiwa	1. Dinas ESDM Prov.Jateng; 2. Masyarakat.
1)	Sasaran Program	**Program :** Pengelolaan Ketenagalistrikan	1. Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai K2 2. Persentase akses listrik untuk	Adanya kejadian kebakaran yang disebabkan karena instalasi listrik	Risiko operasional	Masih banyak instalasi listrik pada fasilitas publik yang belum memenuhi aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)	Adanya korban jiwa dan materi	1. Dinas ESDM Prov.Jateng 2. Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			masyarakat sesuai K2 Wilayah Kendeng Muria 3. Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai K2 Wilayah Kendeng Selatan 4. Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai K2 Wilayah Merapi 5. Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai K2 Wilayah Semarang Demak 6. Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai K2 Wilayah Serayu Selatan 7. Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai K2 Wilayah Serayu Tengah 8. Persentase akses listrik untuk masyarakat	Masih ada masyarakat yang mengakses listrik PLN secara ilegal	Risiko operasional	Terdapat wilayah yang belum terjangkau listrik PLN	Kondisi listrik di Jawa Tengah over supply	Dinas ESDM Prov.Jateng
				Masyarakat enggan memasang sambungan listrik secara mandiri (menyalur/levering)	Risiko Operasional	Biaya penyambungan baru listrik kurang ekonomis	Kondisi listrik di Jawa Tengah over supply	1. Dinas ESDM Prov.Jateng 2. Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sesuai K2 Wilayah Serayu Utara 9. Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai K2 Wilayah Sewu Lawu 10. Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai K2 Wilayah Slamet Selatan 11. Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai K2 Wilayah Slamet Utara 12. Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai K2 Wilayah Solo 13. Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai K2 Wilayah Ungaran Telomoyo					

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a)	Sasaran Kegiatan	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	Terdapat badan usaha yang tidak memperdulikan kewajiban pemenuhan K2	Risiko Fraud	Gratifikasi atas rekomendasi temuan hasil inspeksi	Instalasi tidak aman dan berpotensi bahaya	1. Dinas ESDM Jateng 2. Masyarakat
				Pemilik instalasi listrik tidak bersedia memenuhi aspek Keselamatan Ketenagalistrikan	Risiko Kepatuhan	Ovelaping Regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan sektor ESDM dengan Regulasi K3 sektor Ketenagakerjaan	Instalasi tidak aman dan berpotensi bahaya	1. DInas ESDM Jateng 2. Masyarakat
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan	Pemilik instalasi belum memenuhi aspek perizinan	Risiko Kepatuhan	1. Ketidaktahuan pemilik instalasi mengenai regulasi perizinan ketenagalistrikan 2. Rendahnya kesadaran pemilik instalasi mengenai perizinan ketenagalistrikan	Tidak terpenuhi pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan	Dinas ESDM Prov. Jateng
				Terjadi pelanggaran SOP Persetujuan Teknis Perijinan Ketenagalistrikan	Risiko Fraud	Pelaku usaha memberikan suap atas pemberian persetujuan teknis perizinan ketenagalistrikan	Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas instansi Pemerintah.	Dinas ESDM Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	Kurang tersosialisasinya informasi keselamatan kepada pemilik usaha ketenagalistrikan.	Risiko Operasional	1. Latar belakang pendidikan peserta non Teknik 2. Pemilik instalasi menganggap pelaksanaan K2 tidak begitu penting	Pelaksanaan K2 tidak dapat berjalan secara optimal	1. DInas ESDM Jateng 2. Masyarakat
				pelaku usaha tidak mematuhi kewajibannya sebagai pemegang izin	Risiko Fraud	pelaku usaha memberikan suap kepada oknum supaya tidak terdapat temuan	Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas instansi Pemerintah.	Dinas ESDM Prov. Jateng
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo	Terhambatnya penggantian penerima yang layak mendapatkan bantuan sambungan rumah listrik murah	Risiko Operasional	1. Data usulan penerima sambungan rumah listrik murah dan hemat untuk keluarga tidak mampu (KK miskin belum berlistrik) bersifat sangat dinamis 2. Belum tersedianya data rumah tangga miskin yang memenuhi persyaratan menjadi penerima bantuan sambungan rumah	Tidak terpenuhinya akses listrik untuk warga miskin	1. Dinas ESDM Prov. Jateng 2. Masyarakat
				munculnya aduan dari masyarakat , dan muncul kesalahpahaman terhadap program bantuan	Risiko Fraud	terdapat oknum yang menerima pemberian hadiah dari masyarakat yang mendapatkan sambungan listrik	Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas instansi Pemerintah.	1. Dinas ESDM Prov. Jateng 2. Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				sambungan listrik GRATIS.				
				Material yang dipasang oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan	Risiko operasional	Penyedia mencari keuntungan lebih	Kualitas instalasi sambungan rumah rendah	1. Dinas ESDM Prov. Jateng 2. Masyarakat
5		**Tujuan :** Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)					
a	Sasaran Strategis	**Sasaran :** Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Terjadinya Risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi.	Risiko Strategis	1. Kurangnya komitmen pimpinan dalam menerapkan manajemen risiko; 2. Terjadinya risiko karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan; 3. Tingkat kompetensi pegawai yang masih rendah dalam hal manajemen risiko.	Ketidaktercapaian target-target pada indikator kinerja, baik level Tujuan OPD, Sasaran OPD, level Program, level Kegiatan, dan level Sub Kegiatan berdasarkan perencanaan.	Dinas ESDM Prov.Jateng
1)	Sasaran Program	**Program :** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Penyajian data kinerja tidak dapat dipertanggungjawabkan	Risiko Operasional	1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai 2. Kualitas evaluasi kinerja internal yang masih rendah	Mempengaruhi dalam pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan Pimpinan	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						3. Sumber data diambil dari pihak eksternal		
a)	Sasaran Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Kualitas dokumen perencanaan yang masih kurang/tidak tepat sasaran	Risiko Operasional	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan 2. Sasaran, program dan kegiatan OPD tidak sinkron dengan arah kebijakan daerah/nasional	Kinerja Dinas ESDM Prov. Jateng kurang optimal	Dinas ESDM Prov. Jateng
				Penyusunan dokumen evaluasi yang tidak tepat waktu dan kualitas dokumen evaluasi yang kurang akuntabel	Risiko Operasional	1. Pengelolaan data yang kurang baik dan tersistematis. 2. Pengukuran kinerja yang tidak tepat	Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas ESDM Prov. Jateng	Dinas ESDM Prov. Jateng
b	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Kualitas layanan Dinas ESDM Prov. Jateng tidak memuaskan (tidak sesuai SOP)	Risiko Strategis	1. Tingkat kompetensi pegawai yang masih rendah sebagai pelayan publik; 2. Belum terpenuhinya fasilitas sarana prasarana pelayanan publik yang baik; 3. Belum optimalnya sistem informasi pelayanan public.	Muncul aduan masyarakat	1. Dinas ESDM Prov.Jateng; 2. Masyarakat.
				Munculnya aduan masyarakat	Risiko Fraud	Gratifikasi dalam pemberian layanan sektor ESDM	Mengikis kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah.	Dinas ESDM Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1)	Sasaran Program	**Program :** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Ketidaklancaran pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di Dinas ESDM	Risiko Operasional	Keterbatasan sumber daya	Adanya keluhan dari pegawai Dinas ESDM dan pengguna layanan	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
a)	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen administrasi keuangan tidak lengkap dan tidak tepat waktu	Risiko Operasional	1. Keterbatasan SDM 2. Sarpras yang kurang mendukung	Adanya temuan administrasi keuangan	Dinas ESDM Prov. Jateng
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen administrasi barang milik daerah tidak lengkap dan akuntable	Risiko Operasional	1. Keterbatasan SDM 2. Pencatatan yang tidak tertib	Adanya temuan pencatatan aset/barang milik daerah	Dinas ESDM Prov. Jateng
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	administrasi pegawai yang tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Kurang pahamnya pegawai terkait administrasi kepegawaian yang sesuai aturan	Tertundanya administrasi pegawai	Pegawai pada Dinas ESDM Prov. Jateng
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	adanya kendala dalam pemberian pelayanan masyarakat	Risiko Operasional	1. Keterbatasan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Keterbatasan pengembangan SPBE	Kurang optimalnya pelayanan masyarakat	Dinas ESDM Prov. Jateng
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, dan harga barang yang tidak wajar	Risiko Fraud	Adanya penyimpangan dalam pengadaan barang antara lain Pengadaan barang fiktif, Harga pengadaan barang di-mark–up, dan Hasil	Inefisiensi anggaran, merugikan keuangan negara	Dinas ESDM Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemerintah Daerah				pengadaan barang tidak bermanfaat /tidak dimanfaatkan (misalnya berlebihan, tidak sesuai kebutuhan)		
				Keterlambatan dalam pembelian Alat Laboratorium	Operasional	Merupakan Barang Impor yang pengadaannya harus izin Sekda	Pelayanan Laboratorium ESDM terhambat	Pengguna layanan Dinas ESDM Prov. Jateng
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Lingkungan kantor yang kurang bersih dan tidak aman	Risiko Operasional	Pengelolaan kebersihan dan keamanan kantor yang kurang tertata dan terkelola dengan baik	Lingkungan kantor yang tidak sehat dan tidak aman	Pegawai dan pengguna layanan Dinas ESDM Prov. Jateng
				Pelayanan listrik, air, telepon dan internet terhenti	Risiko Operasional	Ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi untuk pembayaran tagihan	Pelaksanaan pekerjaan terhambat	Pegawai Dinas ESDM Prov. Jateng
				Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Prov. Jateng terhambat	Risiko Operasional	Kurangnya jumlah pegawai Dinas ESDM Prov. Jateng	Pelayanan Dinas ESDM Prov. Jateng kurang optimal	Dinas ESDM Prov. Jateng
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terdapat barang/sarpras yang mengalami kerusakan namun belum teranggarkan	Risiko Operasional	Terdapat pemeliharaan yang bersifat tidak dapat direncanakan	Terkendalanya pekerjaan karena sarpras yang tidak berfungsi baik	Dinas ESDM Prov. Jateng

b. Tabel Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara									
Kegiatan Pertambangan yang tidak dikelola sesuai Kaidah Pertambangan	4	5	20 Sangat Tinggi	Ada	1. Pengawasan bersama Inspektur tambang sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara, serta melaksanakan penertiban bersama aparat penegak hukum di kecamatan dan kabupaten setempat; 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkai (terutama Kementerian ESDM) terhadap pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan; 3. Melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; 4. Sosialisasi regulasi pertambangan.	Memadai	3	4	12 Tinggi

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Pertambangan yang tidak dikelola sesuai Kaidah Pertambangan	2	5	10 Tinggi	Ada	1. Membangun komitmen pegawai untuk bekerja dengan integritas dengan penandatanganan pakta integritas. 2. Public campaign tolak gratifikasi 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas tercantum tugas untuk "Tidak Menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun" 4. OSS Minerba dan pelaksanaan permohonan perizinan melalui sistem 5. Pelaksanaan pengawasan sesuai SOP/Perda Nomor 11 Tahun 2024	Memadai	1	5	5 Sedang
Pemanfaatan lahan di gunung ragas tidak memenuhi kaidah GMP	2	4	8 Sedang	Ada	1. Pemantauan dan pengawasan secara berkala. 2. Koordinasi dengan instansi terkait	Memadai	1	4	4 Rendah

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masih terdapat pengambilan sumber daya alam/ penambangan tanpa izin	5	4	20 Sangat Tinggi	Ada	1. Pengawasan bersama Inspektur tambang sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara, serta melaksanakan penertiban bersama aparat penegak hukum 2. Telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait (terutama Kementerian ESDM) terhadap pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan 3. Telah dibentuk Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur No. 543/5 Tahun 2023	Memadai	5	3	15 Tinggi
Masih adanya pelaku izin usaha pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi tata tertib administrasi	5	4	20 Sangat Tinggi	Ada	1. Pembinaan dan pengawasan terkait penerapan Good Mining Practice (GMP) bersama Inspektur Tambang 2. Sosialisasi opsen pajak MBLB 3. Rekonsiliasi data produksi bersama instansi pengelola keuangan kab./kota	Memadai	4	3	12 Tinggi
Pemanfaatan lahan di gunung ragas untuk meningkatkan PAD tidak berjalan baik atau kerja sama berhenti sebelum masa kontrak selesai	3	3	9 Sedang	Ada	1. monev secara berkala, setiap bulan dilakukan rapat evaluasi laporan produksi 2. evaluasi besaran kontribusi setiap 5 tahun, dapat dilakukan adendum perjanjian kontrak	Memadai	2	3	6 Sedang

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Munculnya aduan/ keluhan dari pengguna layanan	2	3	6 Sedang	Ada	1. Peningkatan kompetensi petugas layanan 2. Peningkatan sarpras pengujian mekanika tanah dan batuan 3. Pemberian layanan sesuai dengan SOP/SPP	Memadai	1	3	3 Rendah
Masih adanya perbedaan harga jual mineral bukan logam dan batuan oleh pelaku usaha pertambangan	4	2	8 Sedang	Ada	1. Telah ada Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batuan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 2. Rekonsiliasi data produksi bersama instansi pengelola keuangan kab./kota 3. Pemantauan produksi melalui pengawasan secara berkala dan aplikasi SILUP	MEMADAI	3	2	6 Sedang
Durasi waktu proses penerbitan persetujuan teknis perizinan berusaha di bidang pertambangan yang cukup panjang	4	3	12 Tinggi	Ada	1. Koordinasi dengan Korsup Wilayah III KPK RI untuk memfasilitasi ruang diskusi dan penyelesaian atas adanya tumpang tindih aturan sektoral 2. Koordinasi dengan instansi terkait	MEMADAI	3	3	9 Tinggi
Adanya penolakan warga atas kegiatan usaha pertambangan	4	4	16 sangat tinggi	Ada	1. Melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan secara berkala. 2. Pemantauan produksi melalui pengawasan secara berkala dan aplikasi SILUP 3. Koordinasi dengan instansi terkait 4. Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	MEMADAI	3	3	9 Tinggi

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemberian ijin usaha tambang yang melanggar kaidah/etik/SOP	2	5	10 tinggi	Ada	1. Membangun komitmen pegawai untuk bekerja dengan integritas dengan penandatanganan pakta integritas. 2. Public campaign tolak gratifikasi 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas tercantum tugas untuk "Tidak Menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun" 4. OSS Minerba dan pelaksanaan permohonan perizinan melalui sistem 5. menyusun perda tentang minerba 6. Penggunaan aplikasi SILUP dan ANDESIT untuk mengurangi tatap muka dengan pemohon	MEMADAI	1	5	5 Sedang
Masih rendahnya tingkat kepercayaan pengguna jasa uji laboratorium ESDM dengan metode uji yang dilakukan	1	3	3 Rendah	Ada	1. Peningkatan mutu layanan pengujian laboratorium melalui dengan melakukan pengujian sesuai SNI/ ASTM 2. Melakukan kalibrasi peralatan pengujian sebagai jaminan validitas pengujian 3. Melakukan uji banding dengan laboratorium sejenis yang sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional	MEMADAI	2	2	4 Rendah
Proses Pengujian Mekanika Tanah dan Batuan serta Analisa Kimia Tanah dan Batuan tidak sesuai SOP	2	5	10 Tinggi	Ada	1. Membangun komitmen pegawai untuk bekerja dengan integritas dengan penandatanganan pakta integritas 2. Public campaign tolak gratifikasi 3. SOP Pengujian Mekanika Tanah dan Batuan serta Analisa Kimia Tanah dan Batuan	MEMADAI	1	5	5 Sedang

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adanya kecelakaan kerja akibat pengoperasian alat pengujian mekanika	2	4	8 Sedang	Ada	1. Melengkapi kebutuhan APD dan Pembuatan SOP penggunaan APD. 2. Sosialisasi & refresh training kepada seluruh personil laboratorium khususnya analis terkait Ketentuan Safety di Laboratorium 3. Komitmen dalam pelaksanaan safety talk 4. Meningkatkan kepatuhan dalam pemakaian APD	MEMADAI	3	3	3 Rendah
Paparan Radiasi akibat pengoperasian alat dengan Sumber Radiasi Pengion	2	4	8 Sedang	Ada	1. Pelaksanaan persyaratan Manajemen Sesuai PP 33 Tahun 2007 tentang keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktoif dan pelaksanaannya sesuai Perka Bapeten No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi 2. Sosialisasi & training kepada seluruh personil laboratorium khususnya analis operator 3. Melengkapi Operator dengan Alat Rekaman Pemantauan Radiasi 4. Melakukan Medical Checkup rutin bagi petugas Radiasi (Laporan rekaman Pemantauan Kesehatan Bagi Petugas Radiasi) 5. Pemberian extrafooding berupa susu steril/ murni untuk menetralisir paparan radiasi secara rutin setiap bulan	MEMADAI	3	3	3 Rendah

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian									
Terjadinya Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah	4	5	20 Sangat Tinggi	Ada	1. Pengawasan dan penertiban penggunaan air tanah; 2. Sosialisasi Peraturan Perizinan air tanah melalui website Dinas ESDM/media sosial; 3. Koordinasi pengawasan dan penertiban air tanah dengan instansi terkait; 4. Sosialisasi kepada masyarakat/perusahaan untuk mengutamakan penggunaan air permukaan, serta perilaku hemat air.	Memadai	3	5	15 Sangat Tinggi
Terjadinya land subsidence (penurunan muka air tanah)	3	5	15 Sangat Tinggi	Ada	1. Pengawasan dan penertiban penggunaan air tanah; 2. Sosialisasi kepada masyarakat/perusahaan untuk mengutamakan penggunaan air permukaan, serta perilaku hemat air.	Memadai	2	5	10 Tinggi
Pengambilan air tanah tanpa ijin yang masih dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha	5	4	20 Sangat Tinggi	Ada	1. pengawasan dan penertiban pemanfaatan air tanah 2. Telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Perizinan air tanah melalui secara offline maupun online (website Dinas ESDM)	Memadai	4	4	16 sangat tinggi

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					3. Dilaksanakan Rapat Koordinasi pengawasan dan penertiban air tanah				
Adanya pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan/ pemakaian air tanah (Pelanggaran terhadap debit pengambilan air tanah yang diijinkan)	5	4	20 Sangat Tinggi	Ada	1. Mengintensifkan pengawasan dan penertiban 2. Sosialisasi Peraturan Perizinan air tanah melalui website Dinas ESDM 3. Rapat Koordinasi pengawasan dan penertiban air tanah 4. Sosialisasi kepada masyarakat/perusahaan untuk mengutamakan penggunaan air permukaan, serta perilaku hemat air	Memadai	4	4	16 sangat tinggi
Munculnya aduan/ keluhan dari pengguna layanan	2	3	6 Sedang	Ada	1. Peningkatan kompetensi petugas layanan 2. Peningkatan sarpras pengujian air tanah 3. Pemberian layanan sesuai dengan SOP	MEMADAI	1	3	3 Rendah

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terjadinya bencana geologi di daerah rawan bencana geologi yang menimbulkan korban / kerugian	5	3	15 Sangat Tinggi	Ada	1. Pemantauan dan sosialisasi ke masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap gejala kegeologian 2. Koordinasi dengan BPBD dan instansi lainnya (Badan Geologi, BMKG, dll) terhadap hasil pengawasan kegeologian dan inventarisasi data daerah rawan bencana geologi	MEMADAI	5	2	10 Tinggi
Pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah belum memanfaatkan data dan informasi geologi	5	3	15 Sangat Tinggi	Ada	1. Bersinergi dengan instansi pemerintahan lintas sektor vertikal dan horizontal dalam hal pengembangan maupun pembangunan suatu wilayah 2. Penyediaan data dan informasi geologi seperti informasi potensi bencana geologi dalam pengembangan kawasan perkotaan/pedesaan sebagai upaya pengurangan resiko bencana (disaster risk reduction) seperti gempa bumi, gelombang tsunami, gerakan tanah, likuefaksi, dan kebencanaan lainnya 3. Koordinasi dengan BPBD dan instansi lainnya (Badan Geologi, BMKG, dll) terhadap hasil pengawasan kegeologian dan inventarisasi data daerah rawan bencana geologi	MEMADAI	4	2	8 Sedang
Pelaku usaha mengambil air tanah dengan debit yang berlebihan	2	5	10 Tinggi	Ada	1. Membangun komitmen pegawai untuk bekerja dengan integritas dengan penandatanganan pakta integritas. 2. public campaign tolak gratifikasi 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas tercantum tugas untuk "Tidak Menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun"	MEMADAI	1	5	5 Sedang

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4. Penyusunan SOP tentang wasdal implementasi NPA				
Masih ada pengguna air tanah yang belum melaporkan volume penggunaan air tanah	3	4	12 Tinggi	Ada	Telah dilakukan Pendampingan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Air Tanah serta Implementasi Nilai Perolehan Air di Jawa Tengah melalui sosialisasi dan rapat koordinasi.	MEMADAI	3	3	9 Sedang
Masih terdapat pemerintah kab./kota yang melakukan penarikan pajak air tanah tidak sesuai dengan perhitungan NPA	4	3	12 Tinggi	Ada	1. Rekonsiliasi pajak air tanah dengan Instansi yang menangani pendapatan daerah di Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi tentang perhitungan NPA kepada stakeholder terkait 3. Asistensi pemerintah kab./kota dalam penetapan pajak air tanah	MEMADAI	3	2	6 Sedang
pelaku usaha menggunakan air tanah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	5	10 Tinggi	Ada	1. Membangun komitmen pegawai untuk bekerja dengan integritas dengan penandatanganan pakta integritas. 2. public campaign tolak gratifikasi 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas tercantum tugas untuk "Tidak Menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun" 4. SOP tentang rekomendasi teknis perijinan air tanah	MEMADAI	1	5	5 Sedang

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berkurangnya jumlah wilayah pengujian air tanah yang menjadi kewenangan provinsi	4	3	12 Tinggi	Ada	1. Sosialisasi jasa layanan pengujian Air Laboratorium ESDM bekerja sama dengan cabdin 2. Melakukan upaya jemput bola dengan memberikan jasa layanan pengujian dan pengambilan sampel secara insitu 3. Berkoordinasi dengan PUSDATARU terkait layanan pengujian yang bisa disupport dalam program pemantauan air permukaan 4. Meningkatkan kolaborasi kerjasama untuk sosialisasi terkait layanan pengujian air Laboratorium dengan Cabang Dinas dan Asosiasi 5. Melakukan study dan pemenuhan kelengkapan baik bahan maupun alat untuk penambahan parameter pengujian air permukaan (COD, BOD, DO, dll)	MEMADAI	3	2	6 Sedang
Adanya kecelakaan kerja saat proses analisa pengujian air	2	4	8 Sedang	Ada	1. Sosialisasi & refresh training kepada seluruh personil laboratorium khususnya analis terkait Ketentuan Safety di Laboratorium 2. Komitmen dalam pelaksanaan safety talk 3. Meningkatkan kepatuhan dalam pemakaian APD	MEMADAI	3	3	3 Rendah
1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan									

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lambatnya pertumbuhan EBT di Jawa Tengah yang berpengaruh pada besaran porsi EBT dalam Bauran Energi	3	5	15 Tinggi	Ada	1. Pembangunan infrastruktur EBT sesuai potensi wilayah; 2. Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME); 3. Sosialisasi kepada masyarakat untuk pengembangan insfrastruktur EBT	Memadai	3	4	12 Tinggi
Masyarakat/ industri/ instansi terkendala dalam membangun PLTS atap	3	5	15 Tinggi	Ada	1. Sosialisasi terkait regulasi tersebut dan mekanisme pengusulan kuota pembangunan PLTS; 2. Koordinasi intensif dengan PLN selaku pemegang IUPTLS untuk dapat memberikan fasilitasi kuota PLTS terutama dalam proyek pembangunan EBT yang menjadi prioritas.	Memadai	1	5	5 Sedang
Masyarakat kembali menggunakan energi konvensional	3	5	15 Tinggi	Ada	1. Melakukan verifikasi proposal permohonan bantuan/ Selektif dalam penentuan penerima bantuan 2. Memberikan sosialisasi/pelatihan operasional dan pemeliharaan Infrastruktur EBT kepada penerima bantuan/pengelola/ operator Gedung 3. Melakukan monitoring dan pembinaan 4. Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/ Kecamatan/ Perangkat Desa	Memadai	3	4	12 Tinggi

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak tercapainya target pengembangan energi surya dan transisi energi	3	5	15 Tinggi	Ada	1. Rapat evaluasi berkala secara triwulan 2. Perencanaan program kerja bersama selama bulanan, triwulan dan semesteran 3. Pelibatan secara aktif mitra kerjasama dalam program kerja dinas 4. Pelaporan evaluasi kerjasama secara tahunan kepada Bapak Gubernur	Memadai	2	4	8 Sedang
Masyarakat kembali menggunakan energi konvensional	3	5	15 Tinggi	Ada	1. Melakukan verifikasi proposal permohonan bantuan/ Selektif dalam penentuan penerima bantuan 2. Memberikan sosialisasi/pelatihan operasional dan pemeliharaan Infrastruktur EBT kepada penerima bantuan/pengelola/ operator Gedung 3. Melakukan monitoring dan pembinaan 4. Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/ Kecamatan/ Perangkat Desa	Memadai	3	4	12 Tinggi
Usulan nominatif penerima penghargaan DME dan HEA tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh panitia	2	4	8 Sedang	Ada	Sosialisasi dan Rapat Koordinasi terkait Desa Mandiri Energi dan Hemat Energi dan Air (HEA)	MEMADAI	1	3	3 Rendah
Pengusulan kuota BBM/ LPG Bersubsidi tidak tepat sasaran	2	3	6 Sedang	Ada	1. Rapat Koordinasi usulan kuota BBM/LPG di Provinsi Jawa Tengah 2. laporan triwulan distribusi BBM dan LPG dari Pertamina	MEMADAI	1	3	3 Rendah

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terdapat potensi EBT di desa yang belum dimanfaatkan	3	4	12 Tinggi	Ada	1. Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur EBT 2. Melakukan pendampingan energi di wilayah Kab/Kota 3. Penghargaan Desa Mandiri Energi dan Hemat Energi dan Air	MEMADAI	3	3	9 Sedang
Desa yang memiliki potensi biogas dan telah terbangun digester biogas, tidak memanfaatkan EBT	3	5	15 Tinggi	Ada	1. Rapat evaluasi berkala secara triwulan 2. Perencanaan program kerja bersama selama bulanan, triwulan dan semesteran 3. Pelibatan secara aktif mitra kerjasama dalam program kerja dinas	MEMADAI	2	4	8 Sedang
Resistensi masyarakat atas pembangunan Infrastruktur EBT di dekat lingkungan	2	2	4 Rendah	Ada	Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur EBT kepada msyarakat di sekitar lokasi pembangunan	MEMADAI	1	2	2 Sangat Rendah
Terdapat monopoli dalam pemilihan penyedia/tidak transparan dan kurangnya efisiensi anggaran	2	5	10 Tinggi	Ada	1. Membangun komitmen pegawai untuk bekerja dengan integritas dengan penandatanganan pakta integritas. 2. public campaign tolak gratifikasi 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas tercantum tugas untuk "Tidak Menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun" 4. pengawasan berjenjang berkaitan dengan pemilihan penyedia jasa	MEMADAI	1	5	5 Sedang
Infrastruktur Biogas terbangun tidak berfungsi dengan baik	3	4	12 Tinggi	Ada	1. Pemeriksaan Pekerjaan Selama Pembangunan Infrastruktur EBT dan setelah selesai 2. Monitoring dan Evaluasi secara berkala 3. Comisioning Test pada saat Infrastruktur EBT selesai dibangun	MEMADAI	2	4	8 Sedang
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan									

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Distribusi listrik yang belum merata	4	4	16 sangat tinggi	Ada	1. Meningkatkan distribusi listrik untuk keluarga tidak mampu; 2. Koordinasi dengan PT. PLN (Persero) untuk penambahan jaringan listrik di pemukiman baru/wilayah pelosok.	Memadai	3	4	12 Tinggi
Terjadinya bencana kebakaran karena instalasi listrik dari pembangkitan	4	4	16 sangat tinggi	Ada	1. Sosialisasi Keselamatan Ketenagalistrikan 2. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	Memadai	3	4	12 Tinggi
Masih ada masyarakat yang mengakses listrik PLN secara ilegal	3	3	9 Sedang	Ada	1. Fasilitasi dan Koordinasi dengan PT. PLN (Persero) terkait penambahan jaringan listrik 2. Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa	Memadai	2	2	4 Rendah
Masyarakat enggan memasang sambungan listrik secara mandiri (menyalur/levering)	4	3	12 Tinggi	Ada	1. Sosialisasi kepada masyarakat 2. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 3. Pembinaan kepada pemegang IUJPTL terkait biaya instalasi pemasangan baru sambungan rumah	Memadai	3	2	6 Sedang
Adanya kejadian kebakaran yang disebabkan karena instalasi listrik	4	4	16 Sangat Tinggi	Ada	1. Audit instalasi fasilitas publik 2. Sosialisasi K2 3. Monitoring dan evaluasi atas rekomendasi hasil audit instalasi fasilitas publik	Memadai	3	4	12 Tinggi
terdapat badan usaha yang tidak memperdulikan kewajiban pemenuhan K2	2	5	10 Tinggi	Ada	1. Membangun komitmen pegawai untuk bekerja dengan integritas dengan penandatanganan pakta integritas. 2. public campaign tolak gratifikasi	MEMADAI	1	5	5 Sedang

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					3. Surat Tugas Perjalanan Dinas tercantum tugas untuk "Tidak Menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun" 4. SOP pengawasan ketenagalistrikan				
Pemilik instalasi listrik tidak bersedia memenuhi aspek Keselamatan Ketenagalistrikan	3	4	12 Tinggi	Ada	Koordinasi dan Konsultasi dengan stakeholder terkait	MEMADAI	3	3	9 Sedang
Ketidakhadiran peserta sosialisasi K2	3	3	9 Sedang	Ada	Konfirmasi kehadiran peserta	MEMADAI	2	3	6 Sedang
Pemilik instalasi belum memenuhi aspek perizinan	4	3	12 Tinggi	Ada	1. Penggunaan aplikasi SIGANTENG 2. Optimalisasi perizinan secara online 3. Sosialisasi perizinan 4. Pengawasan dan Pembinaan	MEMADAI	2	3	6 Sedang
Terjadi pelanggaran SOP Persetujuan Teknis Perijinan Ketenagalistrikan	2	5	10 Tinggi	Ada	1. Membangun komitmen pegawai untuk bekerja dengan integritas dengan penandatanganan pakta integritas. 2. public campaign tolak gratifikasi 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas tercantum tugas untuk "Tidak Menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun" 4. Pengawasan berjenjang 5. Persetujuan Teknis Perijinan Ketenagalistrikan	MEMADAI	1	5	5 Sedang
Kurang tersosialisasinya informasi keselamatan kepada	3	4	12 Tinggi	Ada	Sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan ketenagalistrikan	MEMADAI	2	2	4 Rendah

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pemilik usaha ketenagalistrikan.									
pelaku usaha tidak mematuhi kewajibannya sebagai pemegang izin	2	5	10 Tinggi	Ada	1. Membangun komitmen pegawai untuk bekerja dengan integritas dengan penandatanganan pakta integritas. 2. public campaign tolak gratifikasi 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas tercantum tugas untuk "Tidak Menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun" 4. Pengawasan berjenjang 5. SOP Pengawasan Ketenagalistrikan	MEMADAI	1	5	5 Sedang
Terhambatnya penggantian penerima yang layak mendapatkan bantuan sambungan rumah listrik murah	5	3	15 Tinggi	Ada	Sinkronisasi data usulan penerima sambungan rumah, serta komunikasi intensif dengan pihak Desa/kecamatan, dan PT. PLN (Persero)	MEMADAI	4	3	12 Tinggi
munculnya aduan dari masyarakat , dan muncul kesalahpahaman terhadap program bantuan sambungan listrik GRATIS.	2	5	10 Tinggi	Ada	1. Membangun komitmen pegawai untuk bekerja dengan integritas dengan penandatanganan pakta integritas. 2. public campaign tolak gratifikasi 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas tercantum tugas untuk "Tidak Menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun" 4. Pengawasan berjenjang 5. Memasang label GRATIS pada tiap rumah penerima bantuan sambungan rumah.	MEMADAI	1	5	5 Sedang

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Material yang dipasang oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan	2	2	4 Rendah	Ada	1. Pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan 2. penggunaan jasa konsultan pengawas	MEMADAI	1	2	2 Sangat Rendah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Kualitas layanan Dinas ESDM Prov. Jateng tidak memuaskan (tidak sesuai SOP)	3	5	15 Tinggi	Ada	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dinas ESDM Prov. Jateng; 2. Adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SPM); 3. Tersedianya sistem informasi pelayanan Dinas ESDM Prov. Jateng yang terintegrasi dengan Website ESDM; 4. Peningkatan Kompetensi pegawai Dinas ESDM Prov. Jateng terkait pelayanan publik melalui pelatihan teknis; 5. Peningkatan komitmen integritas pelayanan yang baik, melalui pakta	Memadai	2	5	10 Tinggi

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					integritas dan pemahaman benturan kepentingan dan budaya anti korupsi.				
Munculnya aduan masyarakat	2	5	10 Tinggi	Ada	1. Membangun komitmen pegawai untuk bekerja dengan integritas dengan penandatanganan pakta integritas. 2. Public campaign tolak gratifikasi 3. Surat Tugas Perjalanan Dinas tercantum tugas untuk "Tidak Menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun" 4. Meningkatkan pengembangan SPBE	Memadai	1	5	5 Sedang
Terjadinya Risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi.	3	5	15 Tinggi	Ada	1. Perencanaan berbasis risiko; 2. Melakukan identifikasi Risiko dan Menyusun Rencana Tindak Pengendalian Risiko; 3. Peningkatan kompetensi pegawai untuk lebih memahami manajemen risiko melalui sosialisasi/pelatihan menajemen risiko; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko.	Memadai	2	5	10 Tinggi

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyajian data kinerja tidak dapat dipertanggungjawabkan	2	3	6 Sedang	Ada	1. Peningkatan kapasitas kompetensi dengan mengikutsertakan pelatihan/Diklat/Bimtek pegawai; 2. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern; 3. Melakukan kegiatan rekonsiliasi inventarisasi dan validasi data sektor ESDM.	Memadai	1	3	3 Rendah
Ketidaklancaran pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di Dinas ESDM	2	3	6 Sedang	Ada	1. Peningkatan Kualitas SDM layanan pada Dinas ESDM Prov. Jateng 2. Peningkatan sarana prasarana Dinas ESDM Prov. Jateng 3. Penerapan layanan sesuai SOP pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	Memadai	1	3	3 Rendah
Kualitas dokumen perencanaan yang masih kurang/tidak tepat sasaran	2	3	6 Sedang	Ada	1. Peningkatan kompetensi pegawai dibidang perencanaan dengan mengikuti sosialisasi/bintek/pelatihan 2. Rapat Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	MEMADAI	1	3	3 Rendah
Penyusunan dokumen evaluasi yang tidak tepat waktu dan kualitas dokumen evaluasi yang kurang akuntabel	2	3	6 Sedang	Ada	1. Penggunaan aplikasi e-controlling kinerja 2. Rapat Pengendalian setiap bulan 3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	MEMADAI	1	3	3 Rendah

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dokumen administrasi keuangan tidak lengkap dan tidak tepat waktu	2	3	6 Sedang	Ada	1. Koordinasi penggunaan aplikasi e-penatausahaan 2. Rekonsiliasi SPJ/keuangan dan pajak 3. Mengikutsertakan pegawai untuk sosialisasi/bimtek/pelatihan penyusunan laporan keuangan	MEMADAI	1	3	3 Rendah
Dokumen administrasi barang milik daerah tidak lengkap dan akuntable	2	3	6 Sedang	Ada	1. Penggunaan aplikasi SIMASET 2. Rekonsiliasi Data aset	MEMADAI	1	3	3 Rendah
administrasi pegawai yang tidak tepat waktu	2	3	6 Sedang	Ada	1. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 2. Peningkatan kompetensi pegawai di Sub Bagian Umum Kepegawaian dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan teknis kepegawaian 3. Penggunaan aplikasi kepegawaian	MEMADAI	1	3	3 Rendah
adanya kendala dalam pemberian pelayanan masyarakat	2	3	6 Sedang	Ada	1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta Peningkatan SPBE	MEMADAI	1	3	3 Rendah

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, dan harga barang yang tidak wajar	2	5	10 Tinggi	Ada	1. Membangun komitmen pegawai untuk bekerja dengan integritas dengan penandatanganan pakta integritas 2. Public campaign tolak gratifikasi 3. Pengadaan dilakukan secara elektronik 4. Melibatkan beberapa pihak diluar pemilik risiko ketika pengadaan, 5. Pengawasan berjenjang	MEMADAI	1	5	5 Sedang
Keterlambatan dalam pembelian Alat Laboratorium	1	4	4 Rendah	Ada	Rencana Pengadaan dipersiapkan di tahun sebelumnya, koordinasi intensif dengan stakeholder terkait	MEMADAI	1	3	3 Rendah
LIngkungan kantor yang kurang bersih dan tidak aman	2	4	8 Sedang	Ada	Telah ada jasa outsourcing kebersihan dan keamanan kantor	MEMADAI	1	4	4 Rendah
Pelayanan listrik, air, telepon dan internet terhenti	2	3	6 Sedang	Ada	1. telah dianggarkan pembayaran listrik, air, telepon dan internet dengan memperkirakan adanya kenaikan tarif atau mengusulkan tambahan anggaran di perubahan APBD	MEMADAI	1	3	3 Rendah
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Prov. Jateng terhambat	2	3	6 Sedang	Ada	Mengusulkan formasi PPPK untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Prov. Jateng	MEMADAI	1	3	3 Rendah
Terdapat barang/sarpras yang mengalami kerusakan namun belum teranggarkan	2	3	6 Sedang	Ada	Penambahan anggaran pemeliharaan pada APBD Perubahan	MEMADAI	1	3	3 Rendah

c. Penetapan Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara				
Kegiatan Pertambangan yang tidak dikelola sesuai Kaidah Pertambangan	12 Tinggi	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	1. Adanya potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada suatu wilayah yang belum terakomodir di dalam RTRW Kab./Kota; 2. Tidak tertibnya administrasi usaha pertambangan yang meliputi perizinan, perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan keselamatan kerja. 3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum/aturan yang berlaku dan rendahnya kepedulian terhadap kelangsungan sumber daya alam.	1. Tidak terwujudnya kaidah pertambangan yang baik dan benar 2. Lahan bekas pertambangan menjadi tidak produktif 3. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup (kerusakan lingkungan hidup) 4. Tata kelola pertambangan (tertib administrasi) yang baik menjadi tidak tercapai 5. Penerimaan Pajak daerah dari sektor pertambangan tidak maksimal
Masih terdapat pengambilan sumber daya alam/ penambangan tanpa izin	15 Tinggi	Kepala Bidang Mineral dan Batubara Kepala Cabang Dinas ESDM	1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum/aturan yang berlaku, rendahnya kesadaran pelaku penambangan ilegal untuk mengajukan izin, dan rendahnya kepedulian terhadap kelangsungan sumber daya alam 2. Belum optimalnya penindakan hukum bagi pelaku PETI 3. Adanya potensi mineral bukan logam dan batuan yang tidak diakomodir dalam tata ruang kabupaten	1. Munculnya konflik sosial di sekitar wilayah kegiatan penambangan illegal 2. Semakin meningkatnya kerusakan lingkungan bekas lokasi pertambangan tanpa izin, karena aktifitas penambangan ilegal tidak menerapkan asas Good Mining Practice 3. Semakin banyak potensi pajak sektor pertambangan yang tidak terbayarkan 4. Kerusakan infrastruktur di sekitar wilayah kegiatan penambangan ilegal
Masih adanya pelaku izin usaha pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi tata tertib administrasi	12 Tinggi	Kepala Bidang Mineral dan Batubara Kepala Cabang Dinas ESDM	1. Usaha Pertambangan tidak tertib administrasi dalam pelaporan produksi pertambangan 2. Pelaku usaha penambangan tidak melaksanakan petunjuk dan arahan dari hasil inspeksi, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku pertambangan berijin dalam	1. Penerimaan Pajak daerah dari sektor pertambangan tidak maksimal

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
			menerapkan sistem penambangan yang baik dan benar 3. Masih adanya izin usaha pertambangan yang belum memiliki tenaga teknis yang berkompeten	
Durasi waktu proses penerbitan persetujuan teknis perizinan berusaha di bidang pertambangan yang cukup panjang	9 Tinggi	Kepala Bidang Mineral dan Batubara/Kepala Seksi Geologi, Mineral dan Batubara	1. Tumpang tindih regulasi antar sektor (tata ruang, kehutanan, lingkungan, wilayah sungai, dsb) 2. Aplikasi perizinan (OSS) belum sempurna	Terhambatnya perizinan pertambangan
Adanya penolakan warga atas kegiatan usaha pertambangan	9 Tinggi	Kepala Bidang Mineral dan Batubara/Kepala Seksi Geologi, Mineral dan Batubara	Pelaku usaha tambang tidak menerapkan good mining practice	Munculnya aduan masyarakat
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian				
Terjadinya Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah	15 Sangat Tinggi	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	1. Masyarakat belum paham terhadap regulasi air tanah; 2. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang bersumber dari air permukaan; 3. Keengganan masyarakat dan pelaku usaha pengguna air tanah untuk mengurus perijinan air tanah; 4. Kurang pedulinya masyarakat/ pemanfaat air tanah terhadap kelangsungan Sumber Daya Alam.	1. Pinsip konservasi air tanah tidak tercapai, sehingga terjadinya kerusakan lingkungan air tanah; 2. Penerimaan Pajak air tanah tidak maksimal; 3. Pengambilan Air Tanah tanpa izin sering memicu konflik horisontal sesama pengguna air tanah.
Terjadinya land subsidence (penurunan muka air tanah)	10 Tinggi	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	1. Pengambilan air tanah yang berlebihan	1. Kerusakan bangunan dan infrastruktur 2. Peningkatan risiko banjir di daerah dataran rendah 3. Kerusakan permanen pada akuifer air tanah dan ekosistem perairan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Pengambilan air tanah tanpa ijin yang masih dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha	16 sangat tinggi	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Kepala Cabang Dinas ESDM	1. Masyarakat belum paham terhadap regulasi air tanah 2. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat dari air permukaan 3. Keengganan masyarakat dan pelaku usaha pengguna air tanah untuk mengurus perijinan air tanah 4. Kurang pedulinya masyarakat/ pemanfaat air tanah terhadap kelangsungan Sumber Daya Alam 5. Dinamika regulasi pada sektor pengelolaan air tanah	4. 1.Pinsip konservasi air tanah tidak tercapai, sehingga terjadinya kerusakan lingkungan air tanah 2. Penerimaan Pajak air tanah tidak maksimal 3. Pengambilan Air Tanah tanpa izin sering memicu konflik horisontal sesama pengguna air tanah
Adanya pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan/ pemakaian air tanah (Pelanggaran terhadap debit pengambilan air tanah yang diijinkan)	16 sangat tinggi	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Kepala Cabang Dinas ESDM	1. Masyarakat belum paham terhadap regulasi air tanah 2. Kurangnya pemahaman para pengguna air tanah terutama yang berskala besar terhadap prinsip konservasi sumber daya air (air tanah) 3. Peningkatan kebutuhan air tanah disebabkan sumber air alternatif belum tersedia; 4. Adanya stigma bahwa biaya pemanfaatan air tanah lebih murah apabila dibandingkan dengan sumber air yang lain	Prinsip konservasi air tanah tidak tercapai, sehingga terjadi kerusakan lingkungan air tanah
Terjadinya bencana geologi di daerah rawan bencana geologi yang menimbulkan korban / kerugian	10 Tinggi	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	1. Karakteristik wilayah yang rawan bencana geologi 2. Okupansi lahan pada daerah rawan bencana geologi oleh aktivitas permukiman warga	Bencana geologi yang mengakibatkan korban/kerugian
Program Pengelolaan Energi Terbarukan				
Lambatnya pertumbuhan EBT di Jawa Tengah yang berpengaruh pada besaran porsi EBT dalam Bauran Energi	12 Tinggi	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	1. Infrastruktur EBT yang terbangun tidak termanfaatkan secara optimal; 2. Energi fosil mudah diperoleh.	1. Tidak tercapainya target bauran energi secara regional maupun nasional 2. Pemanasan global dan perubahan iklim

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Masyarakat kembali menggunakan energi konvensional	12 Tinggi	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan	1. Penerima manfaat tidak mampu menjaga aset dan melakukan pemeliharaan 2. Penerima manfaat tidak menggunakan Infrastruktur EBT sesuai prosedur	1. Infrastruktur EBT tidak dapat berfungsi secara optimal 2. Tidak tercapaianya target persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi 3. Masyarakat tidak mendapatkan sumber energi alternatif dengan biaya yang lebih murah
Masyarakat kembali menggunakan energi konvensional	12 Tinggi	Kepala Cabang Dinas ESDM Prov. Jateng (12 Wilayah Cabang Dinas)	1. Penerima manfaat tidak mampu menjaga aset dan melakukan pemeliharaan 2. Penerima manfaat tidak menggunakan Infrastruktur EBT sesuai prosedur 3. Spesifikasi teknis tidak sesuai dengan Juknis	1. Infrastruktur EBT tidak dapat berfungsi secara optimal 2. Tidak tercapaianya target persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi 3. Masyarakat tidak mendapatkan sumber energi alternatif dengan biaya yang lebih murah
Program Pengelolaan Energi Terbarukan				
Distribusi listrik yang belum merata	12 Tinggi	Dinas ESDM Prov. Jateng	Ketersediaan daya listrik di Jawa Tengah oversupply	menghambat transisi energi dan pengembangan infrastruktur EBT
Terjadinya bencana kebakaran karena instalasi listrik dari pembangkitan	12 Tinggi	Dinas ESDM Prov. Jateng	1. Keandalan pasokan listrik PLN yang kurang stabil yang memicu penggunaan energi listrik non PLN sebagai energi cadangan; 2. Masyarakat kurang memahami keselamatan ketenagalistrikan.	Kerugian secara material dan adanya korban jiwa
Adanya kejadian kebakaran yang disebabkan karena instalasi listrik	12 Tinggi	Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Masih banyak instalasi listrik pada fasilitas publik yang belum memenuhi aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)	Adanya korban jiwa dan materi
pelaku usaha tidak mematuhi kewajibannya sebagai pemegang izin	12 Tinggi	Kepala Seksi Energi	pelaku usaha memberikan suap kepada oknum supaya tidak terdapat temuan	Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas instansi Pemerintah.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Kualitas layanan Dinas ESDM Prov. Jateng tidak memuaskan (tidak sesuai SOP)	10 Tinggi	Dinas ESDM Prov. Jateng	1. Tingkat kompetensi pegawai yang masih rendah sebagai pelayan publik; 2. Belum terpenuhinya fasilitas sarana prasarana pelayanan publik yang baik; 3. Belum optimalnya sistem informasi pelayanan public.	Muncul aduan masyarakat
Terjadinya Risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi.	10 Tinggi	Dinas ESDM Prov. Jateng	1. Kurangnya komitmen pimpinan dalam menerapkan manajemen risiko; 2. Terjadinya risiko karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan; 3. Tingkat kompetensi pegawai yang masih rendah dalam hal manajemen risiko.	Ketidaktercapaian target-target pada indikator kinerja, baik level Tujuan OPD, Sasaran OPD, level Program, level Kegiatan, dan level Sub Kegiatan berdasarkan perencanaan.

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan: Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB							
Sasaran : Meningkatnya penerapan Good Mining Practice (GMP)	Persentase penerapan Good Mining Practice (GMP)	Kegiatan Pertambangan yang tidak dikelola sesuai Kaidah Pertambangan	12	1. Adanya potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada suatu wilayah yang belum terakomodir di dalam RTRW Kab./Kota; 2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum/aturan yang berlaku, rendahnya kesadaran pelaku penambangan ilegal untuk mengajukan izin, dan rendahnya kepedulian terhadap kelangsungan	1. Semakin meningkatnya kerusakan lingkungan bekas lokasi pertambangan tanpa izin, karena aktifitas penambangan ilegal tidak menerapkan asas Good Mining Practice; 2. Semakin banyak potensi pajak sektor pertambangan yang tidak terbayarkan.	1. Penyusunan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Mengintensifkan kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan bersama multisektoral, baik secara vertikal maupun horizontal;	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				sumber daya alam.		3. Rapat koordinasi antara pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten tentang sinkronisasi Tata Ruang dalam mengakomodir potensi MBLB. 4. Rapat Koordinasi tentang Opsen Pajak MBLB		
Tujuan: Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan	Indeks Pengelolaan Air Tanah							
Sasaran : Meningkatnya konservasi air tanah	Indeks Ketersediaan Air tanah	Terjadinya Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah	15	1. Masyarakat belum paham terhadap regulasi air tanah; 2. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang bersumber dari air permukaan; 3. Keengganan masyarakat dan	1. Prinsip konservasi air tanah tidak tercapai, sehingga terjadinya kerusakan lingkungan air tanah; 2. Penerimaan Pajak air tanah tidak maksimal; 3. Pengambilan Air Tanah tanpa izin	1. Penyusunan zona konservasi air tanah pada wilayah CAT kewenangan Pemprov; 2. Pemberian Perijinan Air Tanah melalui DPMPTSP Prov. Jateng, dengan rekomendasi	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pelaku usaha pengguna air tanah untuk mengurus perijinan air tanah; 4. Kurang pedulinya masyarakat/ pemanfaat air tanah terhadap kelangsungan Sumber Daya Alam.	sering memicu konflik horisontal sesama pengguna air tanah.	Teknis dari Dinas ESDM Prov. Jateng; 3. Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah.		
		Terjadinya land subsidence (penurunan muka air tanah)	10	Pengambilan air tanah yang berlebihan	1. Kerusakan bangunan dan infrastruktur 2. Peningkatan risiko banjir di daerah dataran rendah 3. Kerusakan permanen pada akuifer air tanah dan ekosistem perairan	Koordinasi dengan Instansi terkait untuk penertiban penggunaan air tanah.	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029
Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan	Intensitas Energi Primer							

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran : Meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Lambatnya pertumbuhan EBT di Jawa Tengah yang berpengaruh pada besaran porsi EBT dalam Bauran Energi	12	1. Infrastruktur EBT yang terbangun tidak termanfaatkan secara optimal; 2. Energi fosil mudah diperoleh.	1. Tidak tercapainya target bauran energi secara regional maupun nasional 2. Pemanasan global dan perubahan iklim	1. Pemetaan potensi EBT di Provinsi Jawa Tengah 2. Optimalilsai pengembangan DME 3. Pembangunan Infrastruktur EBT yang berkelanjutan 4. Evaluasi RUED dan Revisi RUED	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029
Tujuan: Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan	Konsumsi Listrik per Kapita							
Sasaran : Terjaganya ketersediaan daya listrik	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Distribusi listrik yang belum merata	12	Ketersediaan daya listrik di Jawa Tengah oversupply	menghambat transisi energi dan pengembangan infrastruktur EBT	1. Meningkatkan distribusi listrik untuk kluarga tidak mampu; 2. Koordinasi dengan PT. PLN (Persero) untuk penambahan jaringan listrik di pemukiman baru/wilayah pelosok;	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						3. Sosialisasi Electrifying Lifestyle untuk peningkatan distribusi/konsumsi energi listrik.		
		Terjadinya bencana kebakaran karena instalasi listrik dari pembangkitan	12	1. Keandalan pasokan listrik PLN yang kurang stabil yang memicu penggunaan energi listrik non PLN sebagai energi cadangan; 2. Masyarakat kurang memahami keselamatan ketenagalistrikan.	Kerugian secara material dan adanya korban jiwa	1. Sosialisasi Keselamatan Ketenagalistrikan secra masif melalui media sosial; 2. Memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029
Tujuan: Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas Dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah *	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah *	Kualitas layanan Dinas ESDM Prov. Jateng tidak memuaskan (tidak sesuai SOP)	10	1. Tingkat kompetensi pegawai yang masih rendah sebagai pelayan publik; 2. Belum terpenuhinya fasilitas sarana prasarana pelayanan publik yang baik; 3. Belum optimalnya sistem informasi pelayanan public.	Muncul aduan masyarakat	1. Penertiban pelayanan sesuai SOP; 2. Peningkatan kapasitas SDM; 3. Peningkatan sarana dan prasaranan layanan.	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah *	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah *	Terjadinya Risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi.	10	1. Kurangnya komitmen pimpinan dalam menerapkan manajemen risiko 2. Terjadinya risiko karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan; 3. Tingkat kompetensi pegawai yang masih rendah dalam hal manajemen risiko.	Ketidaktercapaian target-target pada indikator kinerja, baik level Tujuan OPD, Sasaran OPD, level Program, level Kegiatan, dan level Sub Kegiatan berdasarkan perencanaan.	Melaksanakan pengelolaan risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko atau meminimalisir dampak.	Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng	2029

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah suatu dokumen perencanaan sehubungan dengan tugas dan fungsi PD yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memiliki fungsi sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan – kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu strategis bedasarkan skala prioritas yang ada dan dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun. Renstra PD harus mampu memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Dokumen Renstra harus mampu menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis**.** Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kepmendagri No 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan terakhir diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka perencanaan pembangunan daerah tersebut harus disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya harus menyesuaikan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan

Keuangan Daerah, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Rencana Strategis PD. Rencana Strategis PD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah.

Pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2025, ditindaklanjuti dengan peenyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025-2029 yang selanjutnya akan diturunkan menjadi RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus ditindaklanjuti, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Kualitas penyusunan Rencana Strategis PD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, isu strategis, tugas dan fungsi PD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis PD. Rencana Strategis PD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam 5 tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal pada implementasinya, maka dalam proses penyusunan dokumen Renstra PD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis PD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, *bottom-up* dan *top-down*. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan industri dan perdagangan.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan disusun sebagai panduan melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 mengacu dan merupakan penjabaran dari RPJMD 2025-2029 yang juga sudah selaras dengan RPJMN 2025-2029. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melalui tahapan :

A. Tahap Penyusunan Rancangan awal Renstra PD

Kegiatan-kegiatan dalam tahap penyusunan rancangan awal Renstra PD dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
2. Menelaahan RTRW Provinsi Jawa Tengah;
3. Penelaahan RPJPD, RPJMD 2025-2029, dan RPJMN 2025-2029
4. Penelaahan Renstra K/L dan Renstra PD Dinas Perindustrian dan
5. Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
6. Pengumpulan data dan informasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Menganalisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
8. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
9. Perumusan strategi, kebijakan dan tahapan pelaksanaan;
10. Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan Rencana Strategis PD;
11. Perumusan indikator kinerja PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

B. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mempertajam dan menyelaraskan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah meliputi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan dengan RPJMD 2025-2029. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu: 1. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 2. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

C. Tahap Penetapan

Setelah rancangan akhir selesai, selanjutnya disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah. Dalam hal ini, pengesahan Renstra Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dengan keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra PD, maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menggunakan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ;
7. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentan Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kepmendagri No 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengeh Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/ aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD, guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

1. 1. Sebagai sarana sinkronisasi dan penjabaran dari pelaksanaan kebijakan RPJMD Jawa Tengah tahun 2025-2029;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Industri dan Perdagangan di Jawa Tengah dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran RPD dan Renstra Kementerian Lembaga yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

1.2 Landasan Hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra;

1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra;

1.4 Sistematika Penulisan penyusunan Renstra;

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, peran (tugas dan fungsi) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan UPT-nya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukanan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat daerah 2024-2026 yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ini. Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan sektor industri dan dagang serta isu-isu strategis

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan Tahun 2025 - 2029. serta memuat Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah, melalui strategi yang ada diharapkan dapat dilakukan langkah-langkah yang strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai. Kebijakan yang akan dijadikan sebagai pedoman guna mengarahkan rumusan strategi yang di pilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

3.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya disusun selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (tiga) tahun kedepan 2025 – 2029.

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengankebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja Perangkat Daerah
2. Cascading Perangkat Daerah
3. Manajemen Risiko Perangkat Daerah
   a. Identifikasi Risiko
   b. Analisis Risiko
   c. Penetapan Risiko Prioritas
   d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mengemban amanah dari kepala daerah untuk membangun Jawa Tengah disektor industri dan perdagangan, yang dalam pelaksanaannya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. **Tugas**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.1.2. **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Pemberdayaan Industri, Pembangunan Sumber Daya Dan Perwilayahan Industri dan Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri.

b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Pemberdayaan Industri, Pembangunan Sumber Daya Dan Perwilayahan Industri dan Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri.

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Pemberdayaan Industri, Pembangunan Sumber Daya Dan Perwilayahan Industri dan Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri.

d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Sekretariat dan Bidang-Bidang serta UPT dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

a. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat memiliki fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas.
4. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
6. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dan Perwilayahan Industri

Tugas pokok Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dan Perwilayahan Industri adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan perwilayahan industri dan Pembangunan sumberdaya industri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Industri Pembangunan Sumber Daya Industri Dan Perwilayahan Industri mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perwilayahan industri dan Pembangunan sumberdaya industri;
2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang pengembangan perwilayahan industri dan Pembangunan sumberdaya industri;
3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perwilayahan industri dan Pembangunan sumberdaya industri; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dan Perwilayahan Industri dibantu oleh Kelompok Kerja Pengembangan Perwilayahan Industri; Kelompok Kerja pengembangan teknologi industri dan Kelompok Kerja Pembangunan SDM Industri.

c. Bidang Pemberdayaan Industri

Tugas Pokok Bidang Pemberdayaan Industri melaksanakan perumusan konsep/penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri;
2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri;
3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan Industri dibantu oleh Kelompok Kerja Pengembangan Industri, Kelompok Kerja Promosi dan Kerjasama industri, dan Kelompok Kerja industri hijau .

d. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri

Tugas Pokok Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri melaksanakan

perumusan konsep/penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri;
2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri;
3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri dibantu oleh Kelompok Kerja sarana prasarana Industri, Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian industri dan Kelompok Kerja data dan informasi industri .

e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Tugas Pokok Bidang Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan bidang Distribusi, Logistik, Pengembangan Sarana dan informasi Perdagangan, Pengendalian Bapokting, Pengembangan Pasar dan UDKM, serta Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Distribusi, Logistik, Pengembangan Sarana dan informasi Perdagangan, Pengendalian Bapokting, Pengembangan Pasar dan UDKM, serta Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Distribusi, Logistik, Pengembangan Sarana dan informasi Perdagangan, Pengendalian

Bapokting, Pengembangan Pasar dan UDKM, serta Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Distribusi, Logistik, Pengembangan Sarana dan informasi Perdagangan, Pengendalian Bapokting, Pengembangan Pasar dan UDKM, serta Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perdagangan Dalam Negeri dibantu oleh Kelompok Kerja pengendalian bapokting, pengembangan informasi dan sarana perdagangan, Kelompok Kerja Promosi dan Kerjasama serta Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga .

f. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Tugas Pokok Bidang Perdagangan Luar Negeri, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor dan impor, promosi dan kerjasama luar negeri, dan informasi dan analisa pasar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor dan impor;
2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama luar negeri; dan
3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan analisa pasar.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perdagangan Luar Negeri dibantu oleh Kelompok Kerja Ekspor dan Impor, Kelompok Kerja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri; serta Kelompok Kerja Informasi dan Analisa Pasar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tengah yang terdiri dari :

a. Balai Industri Logam dan Kayu (BILK) Kelas A

Tugas pokok Balai Industri Logam dan Kayu (BILK) Kelas A melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Industri Logam dan Kayu (BILK) Kelas A mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;
4. Pengelolaan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Industri Logam dan Kayu (BILK) Kelas A dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Kerja Pelayanan Jasa Keteknikan, Kelompok Kerja Penerapan dan Rekayasa dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang kelas A (BPSMB) Surakarta

Tugas Pokok Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta adalah melaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengujian mutu barang dan teknik kalibrasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) kelas A Surakarta mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan dan pengembangan jasa teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi;
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan pengembangan jasa teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi;
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan pengembangan jasa teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi;
4. Pengelolaan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) kelas A Surakarta dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Kerja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi, Kelompok Kerja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang

Tugas Pokok Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang adalah melaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengujian mutu barang dan teknik kalibrasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kelas A Semarang mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan dan pengembangan jasa teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi;
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan pengembangan jasa teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi;
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan pengembangan jasa teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi;
4. Pengelolaan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) kelas A Semarang dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Kerja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi, Kelompok Kerja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki (BIPTAK)

Tugas pokok Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki (BIPTAK) melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil dan alas kaki.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil dan alas kaki;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil dan alas kaki;
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil dan alas kaki;
4. Pengelolaan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Kerja Pengembangan Produk Tekstil, Kelompok Kerja Pengembangan Produk Alas Kaki, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)

Tugas pokok Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan (BIKDK) adalah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang industri kratif digital dan kemasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan (BIKDK) mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana teknis operasional pengembangan industri kreatif digital (Periklanan, Desain Produk, Desain Komunikasi VIsual, Game, FIlm Animasi dan Video, Aplikasi) dan kemasan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Industri Kreatif digital (Periklanan, Desain Produk, Desain Komunikasi VIsual, Game, FIlm Animasi dan Video, Aplikasi) dan kemasan;
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang industri kreatif digital (Periklanan, Desain Produk, Desain Komunikasi VIsual, Game, FIlm Animasi dan Video, Aplikasi) dan kemasan;
4. Pengelolaan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Kerja Industri Kreatif Digital, Kelompok Kerja Pengembangan Kemasan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, membawahkan:
2. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
   a. Sekretaris
   b. Subbagian Program;
   c. Subbagian Keuangan;
   d. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pembangunan Sumberdaya dan Perwilayahan Industri , terdiri atas :
   a. Kepala Bidang Pembangunan Sumberdaya dan

Perwilayahan Industri
   b. Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perwilayahan Industri;
   c. Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Teknologi Industri; dan
   d. Ketua Kelompok Kerja Pengembangan SDM Industri
4. Bidang Pemberdayaan Industri, terdiri atas:
   a. Kepala Bidang Pemberdayaan Industri
   b. Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Industri;
   c. Ketua Kelompok Kerja Promosi dan Kerjasama Industri; dan
   d. Ketua Kelompok Kerja Industri Hijau
5. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasandan Pengendalian Industri, terdiri atas :
   a. Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasandan Pengendalian Industri
   b. Ketua Kelompok Kerja Sarana Prasarana Industri
   c. Ketua Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Industri
   d. Ketua Kelompok Kerja data dan Informasi Industri
6. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas:
   a. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
   b. Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Bapokting, Pengembangan informasi dan sarana perdagangan;
   c. Ketua Kelompok Kerja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri; dan
   d. Ketua Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
7. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas:
   a. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
   b. Ketua Kelompok Kerja Ekspor dan Impor;
   c. Ketua Kelompok Kerja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri; dan
   d. Ketua Kelompok Kerja Informasi dan Analisa Pasar.
8. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah atau Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Balai Industri Logam dan Kayu (BILK) Kelas A, membawahkan :
   a. Kepala Subbagian Tata Usaha;
   b. Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Jasa Keteknikan;.

c. Ketua Kelompok Kerja Penerapan dan Rekayasa;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A, membawahkan :

   a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
   c. Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi;
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A, membawahkan:

   a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
   c. Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi;
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Kepala Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki, Kelas A (BIPTAK) membawahkan:

   a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Produk Tekstil;
   c. Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Produk Alas Kaki;
   d. Kelompok Jabatan Funsional.

5. Kepala Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A, (BIKDK) membawahkan:

   a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Ketua Kelompok Kerja Industri Kreatif Digital;
   c. Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Kemasan;
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar 2.1 dan gambar 2.2 sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

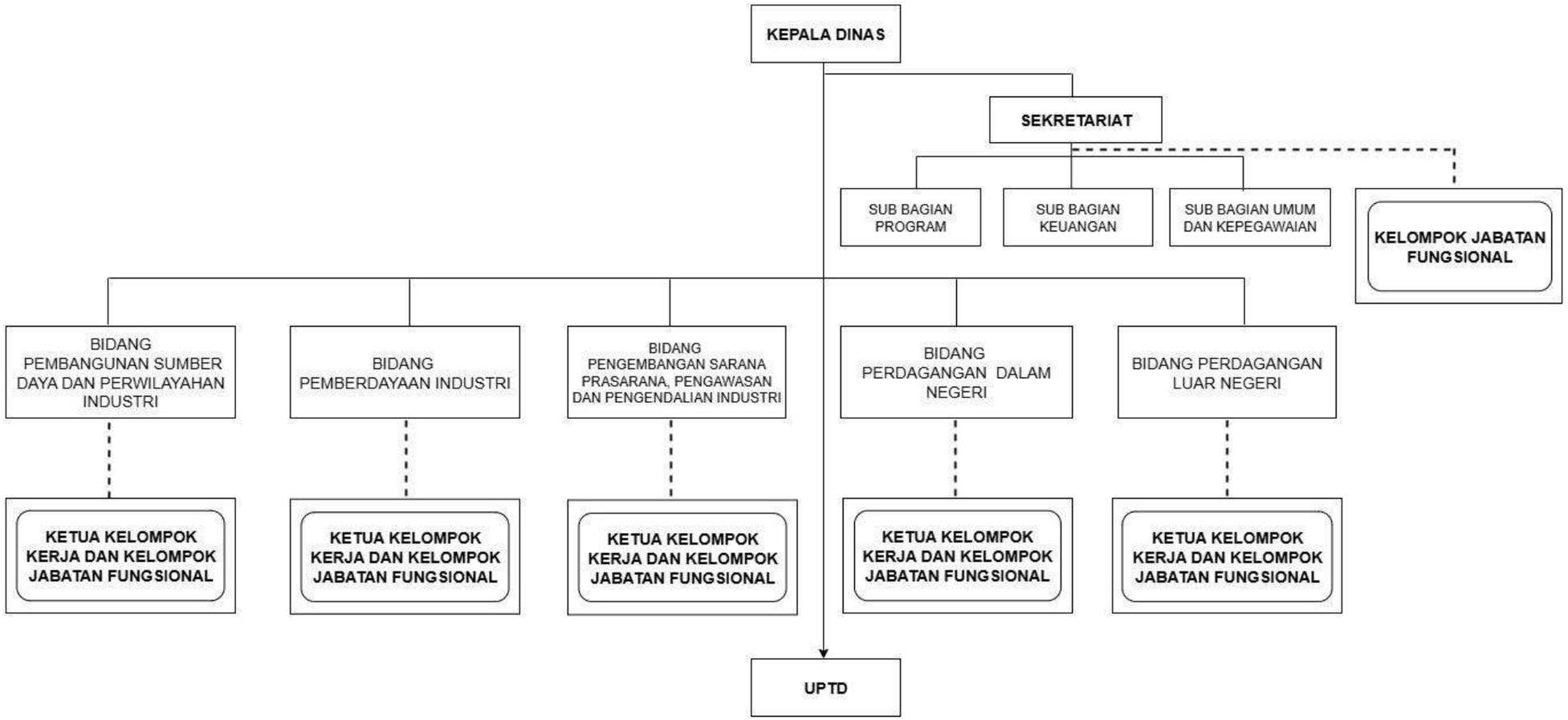

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

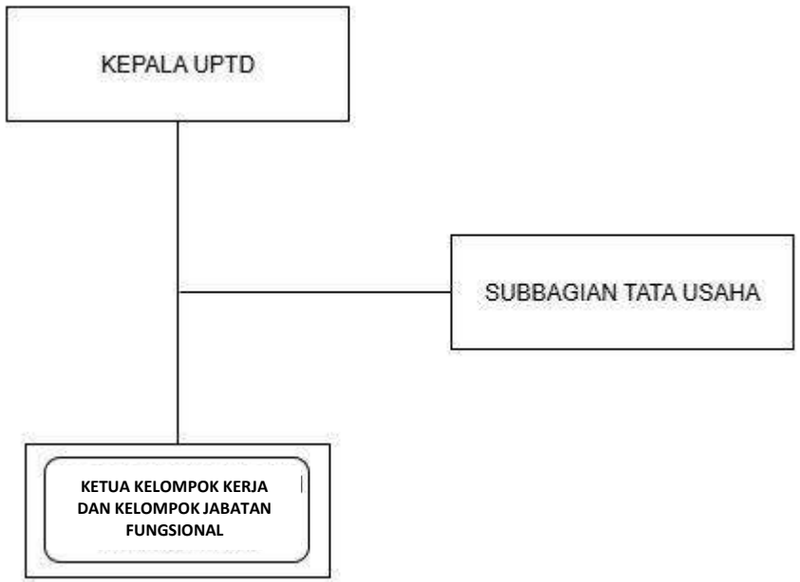

2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah didukung Sumber Daya Manusia, data pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag Jateng, terdiri dari jenjang pendidikan S1/Diploma IV sebanyak 94 orang (49,73%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 45 orang (23,81%), SMA sebanyak 27 orang (14,28%) Diploma III sebanyak 18 orang (9,52%), SD sebanyak 3 orang (1,59%), dan SMP sebanyak 2 orang (1,05%). Komposisi pegawai perempuan sejumlah 98 orang lebih banyak 3,70% dibanding pegawai laki-laki sejumlah 91 orang. Jabatan struktural lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur dengan komposisi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Tabel Komposisi Jabatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya
1. Kepala Dinas	
2. Jabatan Fungsional	• Pembina Industri Ahli Utama • Perencana Ahli Pertama • Perencana Ahli Muda • Analis SDM Apartur Ahli Muda • Analis SDM Aparatur Ahli Pertama • Pranata Komputer Ahli Muda • Pranata Komputer Ahli Pertama • Pranata Komputer Mahir • Pranata Komputer Terampil • Arsiparis Penyelia • Arsiparis Mahir • Arsiparis Terampil • Penata Laksana Barang Penyelia • Penata Laksana Barang Mahir • Penata Laksana Barang Terampil • Pembina Industri Ahli Madya • Pembina Industri Ahli Muda • Pembina Industri Ahli Pertama • Penyuluh Perindag Ahli Muda • Penyuluh Perindag Ahli Pertama • Analis Perdagangan Ahli Madya • Analis Perdagangan Ahli Muda • Analis Perdagangan Ahli Pertama • Pengawas Perdagangan Ahli Madya • Pengawas Perdagangan Ahli Muda • Pengawas Perdagangan Ahli Pertama • Pengolah Data dan Informasi

Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya
	• Penguji Mutu Barang Ahli Madya • Penguji Mutu Barang Ahli Muda • Penguji Mutu Barang Ahli Pertama • Penguji Mutu Barang Penyelia • Penguji Mutu Barang Mahir • Penguji Mutu Barang Terampil
3. Sekretaris • Kassubag Program • Kassubag Keuangan • Kassubag Umum dan Kepegawaian	• Dibawah Subbagian Program : 1. Perencana Muda 2. Perencana Pertama 3. Penelaah Teknis Kebijakan 4. Pengadministrasi Perkantoran • Dibawah Kassubag Keuangan : 1. Analis Laporan Keuangan, 2. Pengolah data Anggaran dan Perbendaharaan 3. Bendahara, 4. Pengadministrasi Keuangan, 5. Verifikator Keuangan • Dibawah Subbagian Umum dan Kepegawaian 1. Analis SDM Aparatur Ahli Muda 2. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 3. Pranata Komputer Ahli Muda 4. Pranata Komputer Ahli Pertama 5. Arsiparis Penyelia 6. Arsiparis Mahir 7. Arsiparis Terampil 8. Penata Laksana Barang Penyelia 9. Penata Laksana Barang Mahir 10. Penata Laksana Barang Terampil
4. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1. Analis Perdagangan Ahli Madya 2. Analis Perdagangan Ahli Muda 3. Analis Perdagangan Ahli Pertama 4. Penelaah Teknis Kebijakan 5. Pengolah Data dan Informasi 6. Pengadministrasi Perkantoran
5. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri	1. Analis Perdagangan Ahli Madya 2. Analis Perdagangan Ahli Muda 3. Analis Perdagangan Ahli Pertama 4. Penelaah Teknis Kebijakan 5. Fasilitator Perdagangan 6. Pengolah Data dan Informasi 7. Pengadministrasi Perkantoran
6. Kepala Pembangunan Sumber Daya Industri Dan Perwilayahan Industri	1. Pembina Industri Ahli Madya 2. Pembina Industri Ahli Muda 3. Pembina Industri Ahli Pertama 4. Penyuluh Perindag Ahli Muda 5. Penyuluh Perindag Ahli Pertama 6. Penelaah Teknis Kebijakan 7. Pengadministrasi Perkantoran

Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Industri	1. Pembina Industri Ahli Madya 2. Pembina Industri Ahli Muda 3. Pembina Industri Ahli Pertama 4. Penyuluh Perindag Ahli Muda 5. Penyuluh Perindag Ahli Pertama 6. Penelaah Teknis Kebijakan 7. Pengadministrasi Perkantoran
8. Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri	1. Pembina Industri Ahli Madya 2. Pembina Industri Ahli Muda 3. Pembina Industri Ahli Pertama 4. Penyuluh Perindag Ahli Muda 5. Penyuluh Perindag Ahli Pertama 6. Penelaah Teknis Kebijakan 7. Pengadministrasi Perkantoran
9. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	1. Penguji Mutu Barang Ahli Madya 2. Penguji Mutu Barang Ahli Muda 3. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama 4. Penguji Mutu Barang Penyelia 5. Penguji Mutu Barang Mahir 6. Penguji Mutu Barang Terampil 7. Pranata Komputer Mahir 8. Pranata Komputer Terampil 9. Pengolah Data dan Informasi 10. Pengadministrasi Perkantoran
10. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang ● Kassubag Tata Usaha	1. Penguji Mutu Barang Ahli Madya 2. Penguji Mutu Barang Ahli Muda 3. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama 4. Penguji Mutu Barang Penyelia 5. Penguji Mutu Barang Mahir 6. Penguji Mutu Barang Terampil 7. Pranata Komputer Mahir 8. Pranata Komputer Terampil 9. Pengolah Data dan Informasi 10. Pengadministrasi Perkantoran
11. Kepala Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki ● Kassubag Tata Usaha	1. Penyuluh Perindag Ahli Madya 2. Penyuluh Perindag Ahli Muda 3. Penyuluh Perindag Ahli Pertama 4. Pembina Industri Ahli Muda 5. Pembina Industri Ahli Pertama 6. Penelaah Teknis Kebijakan 7. Pengelola Layanan Operasional 8. Pengadministrasi Perkantoran 9. Pranata Komputer Mahir 10. Pranata Komputer Terampil 11. Pengolah Data dan Informasi 12. Operator Layanan Operasional 13. Pengelola Umum Operasional
12. Kepala Balai Industri Kreatif	1. Pembina Industri Ahli Muda 2. Penelaah Teknis Kebijakan 3. Pengelola Layanan Operasional

Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya
Digital dan Kemasan ● Kassubag Tata Usaha	4. Pengadministrasi Perkantoran 5. Pranata Komputer Mahir 6. Pranata Komputer Terampil 7. Pengolah Data dan Informasi 8. Pengolah Layanan Operasional 9. Pengelola Umum Operasional
13. Kepala Balai Industri Logam dan Kayu ● Kassubag Tata Usaha	1. Pembina Industri Ahli Muda 2. Pembina Industri Ahli Pertama 3. Penyuluh Perindag Ahli Madya 4. Penyuluh Perindag Ahli Muda 5. Penyuluh Perindag Ahli Pertama 6. Penyuluh Perindag Penyelia 7. Penyuluh Perindag Mahir 8. Penyuluh Perindag Terampil 9. Penelaah Teknis Kebijakan 10. Pengelola Layanan Operasional 11. Pengadministrasi Perkantoran 12. Pengolah Data dan Informasi 13. Pengelola Umum Operasional

Sumber data Sub Bagian Umum Kepegawaian Disperindag Jateng per tanggal 01 Desember 2024

Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jumlah Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	**Jabatan Struktural**						
1	Kepala Dinas	1	S1	1	S2	1	
2	Sekretaris Dinas	1	S1	1	S2	1	
3	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1	S1	1	S2	1	-
4	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri	1	S1	-		-	
5	Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1	S1	1	S2		1
6	Kepala Bidang Industri Agro	1	S1	1	S2	1	
7	Kepala Bidang Industri Non Agro	1	S1	1	S2		1
8	Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	1	S1	1	S2		1
9	Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	1	S1	-	S2		-
10	Kepala Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki	1	S1	1	S2		1
11	Kepala Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan	1	S1	1	S2	1	-
12	Kepala Balai Industri Logam dan Kayu	1	S1	1	S2	1	
13	Kepala Subbag Program	1	S1	1	S2	1	
14	Kepala Subbag Keuangan	1	S1	1	S1	1	
15	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1	S1	1	S2		1
16	Kepala Subbag Tata Usaha	3	S1	3	S1,S2	2	1
B.	**Jabatan Pelaksana Substantif**						
1	Penelaah Teknis Kebijakan	68	S1	33	S1	18	15
2	Pengawas Industri	2	S1	2	S1, S2	-	2
3	Fasilitator Perdagangan	3	S1	-		-	-
4	Penata Kelola Operasional	2	S1	-		-	-
5	Pengolah Data dan Informasi	67	S1	30		8	22
6	Pengelola Layanan Operasional	27	S1	12	S2	1	11
7	Operator Layanan Operasional	5	S1	5	D4, S1	5	-
8	Pengadministrasi Perkantoran	49	S1	24	S1	22	2

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jumlah Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Pengelola Umum Operasional	-	S1	-	S1	-	-
C.	**Jabatan Fungsional Tertentu**						
1	Pembina Industri Ahli Utama	1		0		-	-
2	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	1		0		-	-
3	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1		1		1	-
4	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1		0		-	-
5	Analis Perdagangan Ahli Madya	4	S1	1	S2	1	-
6	Analis Perdagangan Ahli Muda	12	S1	11	S1, S2	3	8
7	Analis Perdagangan Ahli Pertama	15		9		4	5
8	Pembina Industri Ahli Madya	5		1		1	-
9	Pembina Industri Ahli Muda	13	S1	9	S1, S2	5	4
10	Pembina Industri Ahli Pertama	19		3		3	-
11	Perencana Muda	1		0		-	-
12	Perencana Pertama	1		0		-	-
13	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	1		0		-	-
14	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	2	S1	0	S1	-	-
15	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	4		3		1	2
16	Penguji Mutu Barang Ahli Madya	7	S1	1	S1	-	1
17	Penguji Mutu Barang Ahli Muda	12	S1	5	S1,S2	3	2
18	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	16	S1	9	S1	3	6
19	Penguji Mutu Barang Mahir	8	D3	1	SMA,S1	-	1
20	Penguji Mutu Barang Penyelia	4	D3	0	D3,SMA,S1	-	-
21	Penguji Mutu Barang Terampil	7	D3	4	S1	2	2
22	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	15	S1	7	S2	3	4
23	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda	10	S1	1	S1	-	1
24	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Madya	4	D3	0	D3	-	-

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jumlah Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Jumlah	Kualifikasi	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Penyelia	2	S1	1	S1	1	-
26	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Mahir	-		0		-	-
27	Pranata Komputer Ahli Muda	1		0		-	-
28	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	S1	2	S1	1	1
29	Arsiparis Penyelia	1		0		-	-
30	Arsiparis Mahir	2		0		-	-
31	Arsiparis Terampil	3		0		-	-
32	Penata Laksana Barang Penyelia	-		0		-	-
33	Penata Laksana Barang Mahir	-		0		-	-
34	Penata Laksana Barang Terampil	-		0		-	-
35	Pranata Komputer Terampil	5		0		-	-
36	Pranata Komputer Mahir	5		0		-	-

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengopKelompokalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana prasarana sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Sarana Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	URAIAN	Jml.	Nilai Aset (Rp)
1	2	3	4
1	TANAH	16	22.444.664.587
2	ALAT BESAR	17	6.511.813.135
3	ALAT ANGKUTAN	39	6.932.069.245
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1.009	13.954.136.663
5	ALAT PERTANIAN	9	39.750.000
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	5.157	20.305.261.066
7	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	163	2.647.181.928
8	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	35	109.729.636

No.	URAIAN	Jml.	Nilai Aset (Rp)
9	ALAT LABORATORIUM	483	28.289.785.741
10	ALAT PERSENJATAAN	1	19.882.000
11	ALAT KOMPUTER	645	7.830.602.536
20	PERALATAN OLAH RAGA	25	200.900.250
21	BANGUNAN GEDUNG	27	91.140.474.756
27	INSTALASI	2	50.751.450
28	JARINGAN	5	261.556.700
29	BAHAN PERPUSTAKAAN	1.104	215.438.036
30	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	26	102.258.236
	Jumlah	8.766	201.056.255.969

Sumber data sub bagian umum kepegawaian Disperindag Jateng. Data per 31 Desember 2024

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembaangunan sektor industri dan perdagangan dalam 2 periode masa perencanaan yaitu periode Renstra 2018-2023 dan periode transisi kepemimpinan kepala daerah yaitu Renstra 2024-2026, telah menyelesaikan target kinerja pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun tingkat capaian kinerja yang diukur sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / sampai Dengan tahun (%)				
								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	**Renstra PD Tahun 2018-2023**																					
	RPJMD																					
a			**Tujuan PD**																			
			Persentase kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	%	-	-	-	13,07	13,08	13,18	13,18	-	13,5	13,76	13,6	13,61	-	103,28	105,19	103,18	103,26	-
			Persentase kontribusi sektor industri dalam PDRB	%	-	-	-	34,09	34,19	34,33	34,33	-	34,44	34,29	33,93	34,03	-	101,02	100,29	98,83	99,12	-
b			**Sasaran PD** Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	-	-	-	5,10	5,35	5,6	5,65	-	-3,8	5,8	4,32	4,98	-	-71,03	103,57	76,46	84,41	-
			Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	-	-	-	5,10	5,35	5,65	5,65	-	-3,8	2,34	3,88	4,31	-	-71,03	41,42	66,32	76,28	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / sampai Dengan tahun (%)				
								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
c	**Urusan Industri**																					
1	Penguatan dan Pengembangan Industri Agro	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro	%	-	-	-	5,69	5,75	5,89	6	-	1,03	2,78	3,54	4,72	-	17,91	47,2	59	78,67	-
2	Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro	%	-	-	-	3	3	3	3	-	-9	1,55	4,5	1,17	-	-300	51,67	150	39	-
3	Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	-	-	-	4,1	4,25	4,31	4,35	-	3,54	4,25	4,38	6,29	-	83,29	98,61	100,69	144,6	-
4	Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	-	-	-	3,17	3,17	3,17	3,17	-	3,82	3,68	3,55	13,7	-	120,5	116,09	111,99	432,18	-
5	Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	-	-	-	85	85	85	85	-	84,13	74,22	84,36	95,79	-	98,98	87,32	99,25	112,69	-
	Urusan Perdagangan																					

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / sampai Dengan tahun (%)				
								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah	%	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	9,28	8,03	-	-	-	132,57	114,71	-
2	Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor	Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas	Juta US$	-	-	-	6.518	6.739	6.968	7.430	-	7704,15	10257,35	11210,92	9.868,62	-	118,20	152,21	160,89	132,82	-
3	Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center)	%	-	-	-	13	12,5	12	11,5	-	9,26	7,71	9,88	9,04	-	74,08	64,25	85,91	127,21	-
4		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	%	-	-	-	-	-	0,19	0,21	-	-	-	2,4	0,60	-	-	-	1263,15	285,71	-
5		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri	%	-	-	-	-	-	8	0,21	-	-	-	8,55	0,6	-	-	-	106,87	285,71	-
6	Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan	%	-	-	-	6	5	4	3	-	0,9	4,23	1,6	2,64	-	18	105,75	53,33	113,64	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / sampai Dengan tahun (%)				
								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta)	%	-	-	-	5	5	5	5	-	4,02	5,17	5,96	5	-	80,4	103,4	119,2	100	-
8	Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang)	%	-	-	-	4,55	4,35	4,17	4	-	28,11	19,18	25,22	10,89	-	646,21	459,95	630,5	272,25	-
B	**Renstra PD Tahun 2024-2026**																					
	RPJMD	**Pemutakhiran Nomenklatur Kepmendagri No: 050-5889 Th 2021**																				
1	**Tujuan PD**																					
	Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (PE)																					
	Indikator : Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan			%	-	-	-	-	-	-	-	4,51	-	-	-	-	4,16	-	-	-	-	92,24
	Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Indikator : Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan			%	-	-	-	-	-	-	-	3,25	-	-	-	-	3,52	-	-	-	-	108,31

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / sampai Dengan tahun (%)				
								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	**Sasaran PD** Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB																					
	Indikator : Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB			%	-	-	-	-	-	-	-	4,82	-	-	-	-	6,26	-	-	-	-	129,88
	Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB																					
	Indikator : Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB			%	-	-	-	-	-	-	-	3,89	-	-	-	-	6,75	-	-	-	-	173,52
C	**Urusan Industri**																					
1	Penguatan dan Pengembangan Industri Agro	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan produksi industri agro	%	-	-	-	-	-	-	-	2,25	-	-	-	-	4,62	-	-	-	-	205,33
2	Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	%	-	-	-	-	-	-	-	2,25	-	-	-	-	1,66	-	-	-	-	73,78

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / sampai Dengan tahun (%)				
								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	-	-	-	-	-	-	-	4,38	-	-	-	-	4,55	-	-	-	-	103,88
4	Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	-	-	-	-	-	-	-	3,45	-	-	-	-	3,61	-	-	-	-	104,64
5	Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	99	-	-	-	-	116,47
	Urusan Perdagangan																					
1	-	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah	%	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	19,57	-	-	-	-	244,63
2	Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor	Pengembangan Ekspor	Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	%	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	9,09	-	-	-	-	454,5
3	Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/ kota		-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	8,32	-	-	-	-	120,19

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun / sampai Dengan tahun (%)				
								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	%	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	103,94	-	-	-	-	346,47
			Persentase kinerja realisasi pupuk		-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	91,18	-	-	-	-	101,31
4	-	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi		-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	23,5	-	-	-	-	235
5	-	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri		-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	45	-	-	-	-	450
6	Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	%	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3,23	-	-	-	-	323
7	Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta)	%	-	-	-					5					7,5					150
8	Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang)	%	-	-	-					10					39,74					397,4

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa Periode pengukuran dibagi dalam dua rentang waktu, yaitu Renstra PD 2018–2023 dan Renstra PD 2024–2026 dalam pengukuran Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024. Pada Renstra 2018–2023, data mencakup target dan realisasi capaian tahunan dari tahun 2020 hingga 2023. Hal ini menggambarkan hasil kerja Disperindag terhadap sasaran RPJMD serta tujuan pembangunan sektor industri dan perdagangan yang telah ditetapkan. Indikator pada periode tahun 2020-2023 adalah Persentase pertumbuhan produksi industri agro; Persentase pertumbuhan produksi industri non-agro; Persentase kenaikan pelaku usaha layanan kemasan dan industri kreatif; Persentase kenaikan pelaku usaha memanfaatkan layanan keteknikan logam/kayu; Persentase peserta pelatihan diserap industri tekstil & alas kaki; Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA; Nilai ekspor non-migas; Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kab/kota; Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan; Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha difasilitasi pameran; Persentase jumlah barang tidak sesuai standar saat pengawasan; Persentase kenaikan layanan pengujian & sertifikasi (BPSMB Surakarta & Semarang).

Sementara itu, pada Renstra 2024–2026 sesuai dengan pemutakhiran Nomenklatur Kepmendagri No: 050-5889 Th 2021, tabel melanjutkan pencatatan capaian kinerja dengan indikator yang masih sama namun menyesuaikan arah kebijakan baru. Data capaian yang sudah tercatat pada tahun 2024 menunjukkan awal periode baru perencanaan, sekaligus menegaskan keberlanjutan program dari periode sebelumnya baik indikator tujuan, sasaran dan indikator program. Indikator pada periode tahun 2024 adalah Persentase pertumbuhan produksi industri agro; Persentase pertumbuhan produksi industri non-agro; Persentase kenaikan pelaku usaha difasilitasi layanan kemasan & industri kreatif; Persentase kenaikan pelaku usaha memanfaatkan layanan keteknikan logam/kayu; Persentase peserta pelatihan diserap industri tekstil & alas kaki; Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA; Persentase kenaikan nilai ekspor non-migas; Persentase disparitas harga kebutuhan pokok di 35 kab/kota; Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi; Persentase kinerja realisasi pupuk; Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi; Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha difasilitasi pameran; Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen; Persentase kenaikan layanan pengujian & sertifikasi (BPSMB Surakarta & Semarang).

Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	0	0	0	0	0	2.704.153.000	3.950.000.000	4.765.886.000	5.758.064.000	5.873.646.000
2	Belanja	125.215.645.000	119.295.963.000	109.841.329.000	130.828.145.000	126.757.220	74.786.752.000	108.732.159.000	108.657.394.000	124.283.068.000	95.352.404.000

No	Uraian	Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Anggaran Realisasi
1	Pendapatan	3.250.771.954	4.182.473.844	4.864.049.744	5.568.894.214	4.742.890.030	120,21	105,89	102,06	96,71	80,75	21,03	74,41
2	Belanja	69.948.565.900	55.640.686.435	97.043.528.504	117.539.682.258	93.306.379.040	93,53	51,17	89,31	96,60	97,85	9,95	1,04
3	Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.4. Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan sangat beragam baik pada tingkat strategis maupun operasional. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa dikatakan selalu muncul dalam setiap tahapan pembangunan, hanya saja dampak dari permasalahan tersebut mulai menurun pasca adanya intervensi dari Pemerintah. Adapun permasalahan tersebut yaitu :

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Perdagangan			
1	Masih rendahnya kapasitas dan produktifitas SDM sektor perdagangan	Rendahnya kompetensi dan ketrampilan SDM Perdagagangan	Masyarakat yang memilih untuk bekerja di sektor perdagangan masih di dominasi dari masyarakat berpendidikan rendah, serta kecepatan updating kompetensi dan ketrampilan yang belum mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
2	Rendahnya daya saing produk yang diperdagangakan	1. Produk perdagangan di Jawa Tengah masih memiliki harga yang belum bisa stabil dan mampu bersaing, 2. Produk yang dihasilkan masih belum memenuhi standar barang/ jasa yang diperdagangkan 3. Produk yang diperdagangkan masih didominasi barang 1/2 jadi	1. Biaya produksi barang yang masih tinggi, continuitas produk yang tidak terpenuhi, panjangnya rantai distribusi, 2. Produk yang dihasilkan belum memiliki sertifikasi sebagai bukti produk tersebut memenuhi standarisasi produk baik dari sisi proses produksi ataupun kandungan produk sehingga aman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		yang sebenarnya masih dapat diolah dan ditingkatkan nilai produknya.	digunakan dan dapat diterima pasar. 3. Produk 1/2 jadi lebih mudah didapat dan lebih murah untuk di perdagangkan
3	Kurangnya dukungan infrastruktur sarana prasarana perdagangan	1. Masih sedikitnya jumlah sarana perdagangan yang dimanfaatkan 2. Informasi perdagangan yang kurang informatif 3. Sarana perdagangan yang tersedia belum memenuhi kebutuhan atau ekspektasi pengguna layanan.	1. Pelaku usaha perdagangan hanya menggunakan sarana perdagangan yang masih traditional belum opKelompokal dalam menggunakan sarana lain yang lebih sesuai dengan tuntutan jaman saat ini seperti mengopKelompokalkan ecommerce, penggunaan gudang SRG dan pasar lelang 2. Informasi perdagangan yang bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. 3. Sarana perdagangan yang tersedia saat ini masih kurang memenuhi standar layanan sehingga kegiatan transaksi semakin lama semakin berkurang karena pelaku usaha dan konsumen memilih sarana lain yang berada diluar Jawa Tengah serta sarpras pendukung yang belum memadai sehingga menghambat dalam distribusi logistik.
4	Pasar produk Jawa Tengah	1. Pasar produk sepanjang waktu tidak	1. Tidak adanya ekspansi pasar ke wilayah wilayah di luar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	yang tidak berkembang	mengalami perkembangan 2. Pemasaran produk yang tidak berkembang	wilayah penjualan biasanya dan pasar non traditional enggan membuka peluang bagi pelaku usaha baru 2. Pemasaran masih menggunakan metode metode yang belum mengikuti perkembangan jaman saat ini dan wilayah pemasaran yang masih terbatas.
5	Kelembagaan perdagangan yang belum opKelompokal	1. Pelaku usaha yang tidak memenuhi regulasi 2. Kurangnya kelembagaan terkait perlindungan kegiatan perekonomian sektor perdagangan	1. Regulasi yang dinamis serta rendahnya pengawasan implementasi regulasi sehingga terjadi banyak penyelewengan regulasi perdagangan 2. Kurangnya kepedulian masyarakat atas perlindungan konsumen dan kurangnya lembaga yang bergerak dibidang tersebut.
Urusan Perindustrian			
1	Masih rendahnya kapasitas dan produktifitas SDM sektor perindustrian	Masih rendahnya jumlah SDM yang siap kerja	Masih rendahnya kompetensi dan ketrampilan SDM
2	Masih rendahnya daya saing produk hasil industri	1. Harga masih terlalu tinggi 2. Produk belum mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar baik dari sisi kualitas dan kuantitas 3. Produk yang di hasilkan masih bernilai rendah	1. Biaya produksi yang tinggi karena bahan baku belum bisa di penuhi sendiri 2. Produktifitas rendah karena teknologi yang tertinggal, kurangnya inovasi dan kurangnya pemenuhan standarisasi industri

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3. Produk mentah atau setengah jadi sudah masuk pasar atau tidak ada pengolahan produk menjadi produk jadi bernilai tinggi
3	Dukungan infrastruktur industri yang masih rendah	1. Sebaran pelaku usaha yang tidak merata sehingga kesulitan dalam pengembangan dan pendataan 2. Infrastruktur pendukung yang belum memadai	1. Ketersediaan lahan dan sarpras untuk pengembangan industri yang masih terbatas hanya terpusat di wilayah pantura 2. Pembangunan dan pengembangan sarana logistik seperti jalan dan angkutan yang belum memadai di bebeberapa wilayah
4	Pasar industri yang kurang berkembang	1. Pelaku usaha menjalankan business as ussual sehingga ekspansi pemasaran bukan menjadi prioritas 2. Permintaan pasar yang dinamis	1. Sulitnya membuka pasar non traditional 2. Metode pemasaran yang digunakan kurang efetif, efisien dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman
5	Kelembagaan industri yang masih perlu dikuatkan	Pelaku usaha masih banyak yang belum memenuhi dan mematuhi regulasi berusaha	Dinamisnya regulasi perijinan berusaha

Penentuan Isu Isu Strategis Pembangunan sektor industri dan perdagangan di jawa Tengah untuk 5 (lima) tahun mendatang masih akan menghadapi tantangan atau isu-isu strategis yang cukup dinamis dan sangat berpengaruh dalam pembangunan. Isu strategis yang saat ini teridentifikasi untuk dapat di selesaikan bersama untuk keberhasilan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. **Penyediaan SDM yang dapat mendorong produktifitas sektor Industri dan Perdagangan**

   SDM menjadi permasalahan utama dari hampir semua sektor, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sektor industri yang merupakan sektor unggulan di Jawa Tengah masih merupakan industri padat karya dimana ketersediaan SDM yang kompeten,

trampil dan siap kerja menjadi komponen utama dalam mendorong produktifitas industri. Demikian hal nya dengan sektor perdagangan, yang selalu dinamis dalam mengikuti perkembangan jaman, budaya dan teknologi sehingga mengharuskan SDM sektor perdagangan harus terampil dan melek teknologi agar dapat meningkatkan produktifitasnya. Menjadi tanggungjawab bersama agar Jawa Tengah mampu menyediakan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak dan berkualitas terutama pada sektor industri dan perdagangan.

Menjawab tantangan tersebut maka program-program pengembangan SDM usia kerja perlu menjadi prioritas sehingga SDM usia kerja di Jawa Tengah dapat dibekali ketrampilan non formal sehingga menjadi SDM siap kerja. Dukungan juga diperlukan dari sektor pendidikan formal untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Jawa Tengah di pasar tenaga kerja. Untuk itu Disperindag telah menyiapkan program-program pengembangan SDM berupa pembakalan pendidikan informal untuk tenaga kerja siap penempatan kerja dan SDM yang siap serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

2. Peningkatan Daya Saing Produk untuk memperluas pasar produk unggulan potensi daerah Jawa Tengah

Dewasa ini dampak dari kondisi geopolitik yang masih belum kondusif mulai dirasakan oleh sektor-sektor unggulan seperti industri dan perdagangan. Banyak pelaku industri dan perdagangan yang tidak mampu melanjutkan usahanya karena hambatan pasar luar negeri yang menjadi tujuan ekspor atau negara asal bahan baku yang masih bergejolak sehingga berdampak langsung pada sektor tersebut di Jawa Tengah. Permasalahan menjadi sebuah tantangan bagi Jawa Tengah untuk membuka pasar non tradional bagi produk produk unggulan ekspor dari Jawa Tengah.

Pasar baru yang akan mulai dijajaki membawa tantangan tersendiri terkait kualitas produk yang akan dipasarkan. Produk Jawa Tengah harus mampu berdaya saing di pasar international. Peningkatan daya saing dari sisi kualitas, ketersediaan stok dan harga yang terjangkau konsumen. Menjawab tantangan tersebut Disperindag berupaya menyusun program-program intervensi dalam upaya peningkatan daya saing produk yaitu hilirisasi, pengembangan teknologi industri, pelayanan jasa kemasan industri, penguatan rantai pasok melalui promosi dan kerjasama, peningkatan citra produk, pelatihan diversifikasi produk serta digitalisasi perdagangan dalam dan luar negeri dengan lokus utama intervensi adalah potensi-potensi unggulan daerah.

3. **Mendorong produktifitas dan daya saing sektor industri dan perdagangan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan produksi maupun keberlanjutan lingkungan.**

Peningkatan produktifitas sektor unggulan memiliki domino effect yang dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sektor-sektor unggulan yang masih ada saat ini secara value kontribusi memang masih mengalami peningkatan namun jika dilihat dari sisi total produksi mengalami penurunan. Produktifitas sektor industri dan perdagangan mulai menurun tanpa diimbangi dengan pertumbuhan jumlah pelaku usaha pada kedua sektor tersebut. Kondisi saat ini pertumbuhan industri-industri baru masih belum secepat sunset industri-industri eksisting, sehingga dibutuhkan intervensi lebih agar lahir industri-industri baru yang mampu menyediakan kebutuhan dan permintaan pasar global

Upaya meningkatkan produktifitas dilakukan dengan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dan meningkatkan nilai produksi kedua sektor tersebut agar selalu maju dan berdaya saing. Upaya pencapaian target peningkatan produktifitas kedua sektor juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan baik dari sisi keberlanjutan produksi maupun keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut agar produk hasil kedua sektor dapat terus memenuhi kebutuhan pasar dan peningkatan produktifitasnya tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Disperindag selaku pemegang tugas dan fungsi terkait pengembangkan sektor industri dan perdagangan telah berupa melakukan intervensi melalui penciptaan teknologi tepat guna yang mampu menghasilkan teknologi yang produktif dan efisien, mengidentifikasi, menggali dan mengembangkan potensi-potensi daerah menjadi produk yang berdaya saing dan dorongan implementasi green industry di Jawa Tengah. Implementasi green industri harus dimulai dari sektor industri terkecil, sehingga ketika berkembang/naik kelas semangat implementasi green industri akan selalu terbawa.

4. **Menjaga stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan bahan penting lainnya di tiap Kab/Kota di Jawa Tengah**

Fenomena kelangkaan stok dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dan bahan penting yang menjadi penyebab utama inflasi masih menjadi hal yang sering terjadi di Jawa Tengah. Disparitas harga antar daerah juga menjadi permasalah tersendiri sebagai dampak dari distribusi barang yang belum efisien. Pemerintah harus hadir untuk memberikan jaminan ketersediaan bapokting sekaligus menciptakan keadilan harga bagi pembeli dan penjual yang adad dipasar.

Intervensi yang dilakukan pemerintah saat ini masih didominasi dengan program program penanganan inflasi dan belum

opKelompokal dalam program pencegahannya. Atas dasar hal tersebut Disperindag berupaya menyusun program-program intervensi untuk pencegahan inflasi melalui pemantauan stok dan harga barang pada level distributor dan pasar, upaya mengurangi panjang rantai distribusi barang melalui kegiatan pasar lelang, kemitraan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan dalam mengopKelompokalkan digitalisasi.

Tabel 3.2
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi SDM Industri dan Perdagangan	Produktifitas sektor industri dan perdagangan kurang opKelompokal karena kurangnya dukungan SDM yang berkualitas dan sesuai kebutuhan	Rendahnya kualitas SDM sehingga kepedulian lingkungan masih sangat rendah (sesuai dengan teori Kuznett)	Kebutuhan SDM siap kerja	Kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi tinggi	Kebutuhan SDM untuk mendukung industri padat karya	Penyediaan SDM yang dapat mendorong produktifitas sektor Industri dan Perdagangan
Potensi SDA unggulan Jawa Tengah	Produk Jawa Tengah belum mampu mengopKelompokalkan Potensi pasar global	Eksploitasi SDA yang kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan	Kebutuhan bahan baku industri	Hilirisasi industri	Pemetaan potensi unggulan daerah	Peningkatan Daya Saing Produk untuk memperluas pasar produk unggulan potensi daerah Jawa Tengah
Potensi pelaku usaha industri dan perdagangan	Produktifitas dan daya yang masih rendah	Peningkatan produktifitas sektor unggulan yang kurang memperhatikan keberlangsungan produksi dan lingkungan hidup karena tingginya biaya operasi industri yang berwawasan lingkungan	Implementasi green industry karena tingginya Exploitasi SDA	Tingginya jumlah industri yang memasuki masa sunset industri	Penumbuhan jumlah pelaku industri dan perdagangan	Mendorong produktifitas dan daya saing sektor industri dan perdagangan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan produksi maupun keberlanjutan lingkungan.

Potensi daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kemudahan akses distribusi logistik	Disparitas harga dan stok antar wilayah	Exploitasi SDA	Keterbatasan pasar internasional	Rendahnya harga jual komoditas pangan di Jateng sehingga kurang diminati pelau usaha perdagangan	Komoditas pangan Jawa Tengah dipasarkan diluar jawa tengah	Menjaga stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan bahan penting lainnya

Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah diuraikan kedalam bidang/balai masing-masing sebagai berikut :

1. Bidang Perdagangan Luar Negeri Negeri:
   Tantangan :
   1) Infrastruktur dan sarana prasarana pendukung perdagangan luar negeri yang belum memadai;
   2) Keterbatasan kapasitas SDM pelaku usaha perdagangan luar negeri;
   3) Hambatan regulasi perdagangan luar negeri;
   4) Citra produk yang masih perlu ditingkatkan;
   5) Keterbatasan data dan informasi perdagangan luar negeri.

   Peluang :
   1) Kemudahan pelayanan dibidang ekspor melalui penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang ekspor secara *online* menggunakan *Affixed Signature and Stamp* (ASnS) dengan *One Day Service*
   2) Memanfaatkan hasil-hasil perundingan bilateral maupun multilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara mitra dagang FTA, PTA dan CEPA;
   3) Potensi pasar non traditional yang masih sangat luas;
   4) Keinginan pelaku usaha yang kuat diantara stakeholder di bidang ekspor di Jawa Tengah untuk meningkatkan ekspor non migas Jawa Tengah.
2. Bidang Perdagangan Dalam Negeri:
   Tantangan :
   1) Harga Bapokting yang masih sering berfluktuasi dikarenakan oleh banyak faktor;
   2) Iklim perdagangan yang belum kondusift;
   3) Produk dalam negeri kurang diminati masyarakat;
   4) Rantai distribusi yang kurang efisien;

5) Ketersediaan Sarana prasarana perdagangan yang belum opKelompokal;
6) Metode pemasaran yang belum sejalan dengan perkembangan jaman dan teknologi;
7) Informasi perdagangan yang belum terintegrasi;
8) Keberadaan Pasar rakyat yang belum mampu bersaing dengan toko swalayan;
9) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) merupakan permasalahan fundamental yang mengakibatkan tingginya angka pelanggaran KI.
10) Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan dalam sistem perlindungan konsumen
11) Tumpang tindih regulasi yang menghambat implementasi dan memerlukan harmonisasi antar instansi
12) Permasalahan perlindungan konsumen yang semakin terdiversifikasi dan kompleks
13) Peraturan perundang-undangan yang kurang selaras dengan kerangka hukum perlindungan konsumen dan kompleksitas permasalahan yang muncul.
14) Regulasi PKTN yang dinamis

Peluang :

1) Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional;
2) Produk-produk UKM di Jawa Tengah semakin bisa diterima secara Nasional;
3) Kesadaran produsen bapok untuk secara bersama-sama mengurangi rantai distribusi bapok;
4) Pengembangan E-Commerce bagi pelaku UDKM;
5) Dukungan kabupaten/kota terkait pengembangan sarana prasarana distribusi di wilayah masing-masing;
6) SDM pelaku usaha sektor perdagangan yang semakin banyak dan kompleks.
7) Sektor ekonomi kreatif di Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan KI yang bernilai ekonomi tinggi.
8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bernilai Ekonomi memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai aset ekonomi.
9) Pelaku usaha dapat memanfaatkan standar dan Kekayaan Intelektual untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk atau jasa mereka
10) Perkembangan teknologi informasi menawarkan peluang untuk transformasi model penanganan keluhan konsumen, dengan mengadopsi sistem daring yang tidak memerlukan pertemuan tatap muka

3. Bidang Pembangunan Sumberdaya dan Perwilayahan Industri:

   Tantangan:

1. Pemerataan Industri di wilayah utara dan selatan jawa
2. Daya dukung Sumber Daya manusia (SDM) industry yang tersedia dan berkompeten dibidangnya
3. OpKelompokalisasi potensi daerah
4. Pengembangan Teknologi Industri

Peluang :

1. Ketersediaan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri
2. Berkembangnya pembangunan kawasan industri dan sentra industri
3. Tingginya Jumlah penduduk usia kerja
4. Beragamnya potensi unggulan daerah
5. Peningkatan Pertumbuhan industry

4. Bidang Pemberdayaan Industri
   Tantangan :
   a. Perubahan Iklim dan Bencana Alam yang dapat mempengaruhi produktifitas ;
   b. Ketergantungan impor bahan baku;
   c. Daya saing produk yang belum sesuai permintaan pasar global;
   d. Regulasi yang kompleks dan birokrasi yang lambat dan perizinan yang rumit serta tumpang tindih anatar pusat dan daerah dapat menghambat investasi dan pengembangan industri agro ;
   e. Keterbatasan akses pasar dan promosi

   Peluang :
   a. Potensi pasar baik didalam maupun di luar negeri yang semakin besar
   b. Dukungan kebijakan pemerintah.
   c. Tuntutan Pasar dalam penerapan Industri hijau pada sektor Industri
   d. Perang dagang antara Cina dan Kanada
   e. Adanya program peningkatan penggunaan produk dalam negeri

5. Bidang Pengembangan Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri :
   Tantangan :

   1) Keterbatasan infrastruktur sehingga menghambat distribusi
   2) Ketergantungan bahan baku impor pada industri unggulan;
   3) Masih rendahnya penguasaan literasi digital pada industri kecil untuk pemasaran dan pengelolaan usaha;
   4) Kesadaran pemenuhan legalitas usaha dan kewajiban berusaha yang masih rendah;
   5) Penurunan daya beli di negara tujuan Ekspor;
   6) Turunnya beberapa kinerja Industri unggulan di Jawa Tengah.

7) Mulai tidak kompetitifnya UMK di beberapa wilayah di Jawa Tengah
8) Sarpras industri yang kurang memadai

Peluang :

1) Pengembangan berbasis kewilayahan melalui Kawasan Industri dan sentra industri di Jawa Tengah;
2) Adanya pengembangan Infrastruktur pendukung Industri seperti Pelabuhan batang, pipa gas dll yang semakin memadahi di wilayah utara jawa;
3) Digitalisasi proses Perijinan berusaha berbasis resiko melalui OSS dan Pengajuan verifikasi/sertifikasi/fasilitas pemerintah melalui SIINas.

6. Balai Industri Logam dan Kayu (BILK):
   Tantangan :
   1) Perubahan iklim ekonomi, tren, serta preferensi konsumen dalam desain dan penggunaan produk industri sehingga mempengaruhi fluktuasi penggunaan jasa layanan Instalasi
   2) Peralatan mesin yang dimiliki sudah tidak mampu menjawab kebutuhan pasar;
   3) Keterbatasan SDM terampil;

   Peluang :
   1) Penerapan manajemen standar kualitas ISO 9001:2015 yang dapat menjamin kualitas jasa layanan yang diberikan sehingga dapat meningkatkan kualitas dari produk industri;
   2) Peluang kerjasama yang semakin luas;
   3) Lokasi yang strategis.

7. Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan;
   Tantangan :
   1) Pengembangan industri kreatif digital dan pengembangan kemasan belum berjalan dengan opKelompokal dikarenakan masih minimnya daya dukung yang meliputi aspek pendanaan, kurangnya sumber daya manusia pengelola yang kompetensi, sarana prasarana (gedung, infrastruktur digital dan mesin produksi kemasan);
   2) Hadirnya komunitas-komunitas atau lembaga kreatif yang menyediakan jasa industri kreatif digital;
   3) Daya dukung Sumber Daya manusia (SDM) yang tersedia dan berkompeten dibidangnya.
   Peluang :
   1) Banyaknya generasi muda yang tertarik menekuni bidang kreatif digital;
   2) Pangsa pasar bidang kreatif digital yang menjanjikan;

3) Potensi IKM di Jateng yang besar;
4) Tumbuhnya wirausaha wirausaha baru;
5) Masih banyak produk dengan desain dan kemasan yang sederhana dan kurang menarik.

8. Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki ;
   Tantangan :
   1) Penurunan minat peserta pelatihan disebabkan waktu pelaksanaan di anggap terlalu lama dan bekerja di industri tekstil dan alas kaki kurang diminati;
   2) Instansi pelatihan & pengembangan (BIPTAK) dituntut bisa mengikuti dinamika perkembangan industri garmen saat ini;
   3) Semakin bertambahnya lembaga pelatihan sejenis baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan;
   4) Dampak dari keterbatasan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana maka menyebabkan penurunan kualitas hasil pelatihan dan tingkat kenyamanan proses pelatihan.
   5) Persaingan SDM industri terampil yang makin kompetitif.

   Peluang :
   1) Menjadi rujukan pengusaha dan masyarakat Jawa Tengah untuk meningkatkan kompetensi industri garmen dan alas kaki;
   2) Menjadi lembaga yang secara praktis & nyata dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah;
   3) Jawa Tengah menjadi sasaran investasi industri padat karya, yaitu meliputi komoditi tekstil dan alas kaki;
   4) Kesiapan SDM industri terampil menjadi salah satu daya tarik investasi di Jawa Tengah.
9. BPSMB Semarang
   Tantangan :
   1) Adanya persaingan bisnis dengan Perusahaan swasta;
   2) Masyarakat masih belum familiar dengan layanan yang ada di BPSMB Semarang;
   3) Sarana dan prasarana yang ada belum dapat mengakomodir penambahan ruang lingkup untuk peningkatan pelayanan

   Peluang :
   1) Penambahan ruang lingkup untuk kalibrasi Tangki Ukur dan unit filling machine;
   2) Penambahan ruang lingkup untuk pengujian garam konsumsi beryodium dan gula palma;
   3) Terbukanya peluang kerjasama dengan Lembaga pemerintah yang lain dalam hal kalibrasi dan pengujian

10. BPSMB Surakarta
    Tantangan :
    1) Semakin banyak kompetitor Lembaga Penilaian Kesesuaian (Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi, LSPro dan LPH) dengan memiliki ruang lingkup dan kompetensinya yang beragam.

2) Perlunya produk ber-SNI guna meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional.
3) Trend masyarakat muslim dunia menggunakan produk bersertifikat Halal.
4) Adanya tren peningkatan permintaan dalam penggunaan makan yang sudah memiliki sertifikat organik

Peluang :

1) Penambahan ruang lingkup untuk kalibrasi Tangki Ukur dan unit filling machine;
2) Penambahan ruang lingkup untuk pengujian garam konsumsi beryodium dan gula palma;
3) Terbukanya peluang kerjasama dengan Lembaga pemerintah yang lain dalam hal kalibrasi dan pengujian

BAB III

TUJUAN, SASASAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

Tujuan yang ingin dicapai untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2025–2029, dan dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri dan perdagangan agar mampu mewujudkan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan. Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan dalam kurun waktu tahun 2025– 2029 adalah meningkatnya PDRB sektor perdagangan dan meningkatnya sistem logistik daerah. Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Industri adalah meningkatnya PDRB sektor perindustrian dan meningkatnya jumlah tenaga kerja industri tekstil dan alas kaki.

Pada table 4-1, disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah beserta indikator kinerjanya.

a. Tujuan Dinas Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah :
    1. Meningkatkan pertumbuhan sektor Perdagangan.
    2. Meningkatkan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan.
    3. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis
b. Sasaran Dinas Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah :
    1. Meningkatnya PDRB sektor perdagangan
    2. Meningkatnya sistem logistik daerah
    3. Meningkatnya PDRB sektor perindustrian
    4. Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki
    5. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah
    6. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko Perangkat Daerah

Selengkapnya relasi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (PE)												
			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	4,31	3,52	3,8	3,95	4,1	4,25	4,4	4,55	4,55
		Meningkatkan PDRB Sektor Perindustrian											
			PDRB Sektor Perindustrian	Milyar Rupiah	577429,04	615195,96	649000	675350	703086	732387	763373	796183	796183
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis												
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	0	83,75	83,8	83,85	83,9	83,95	84	84,01	84,01

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah											
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	0	95,5	95,51	95,52	95,53	95,54	95,55	95,56	95,56
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah											
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	0	3,055	3,06	3,07	3,08	3,09	3,1	3,11	3,11
3	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (TPT)												
			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	4,31	3,52	3,8	3,95	4,1	4,25	4,4	4,55	4,55

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki											
			Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja industri teksil dan alas kaki	%	0	0	0,32	0,32	0,34	0,37	0,39	0,44	0,44
4	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (INF)												
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4,98	4,16	4,2	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	5,1
		Meningkatkan Sistem Logistik Daerah											
			Koevisien Variasi Harga Antar Wilayah	%	0	0	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,2
5	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PE)												

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4,98	4,16	4,2	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	5,1
		Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan											
			PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	230872,97	230872,97	261315	272562	284793	297723	311426	325997	325997

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045 melalui upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sector unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan diwujudkan melalui transformasi ekonomi dan sosial untuk sector industri dan perdagangan. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah periode 2025-2029 dalam menuju transformasi ekonomi dan social sector perindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut:

A. Strategi

A.1. Urusan Perindustrian

Sasaran Meningkatnya PDRB sektor perindustrian di capai dengan beberapa langkah strategis yaitu :

1. **Meningkatkan nilai produksi sektor industri**

   Penurunan produktifitas sektor industri menjadi permasalahan utama saat ini dan kedepannya. Mengurai permasalahan tersebut salah satunya dengan upaya untuk meningkatkan nilai produksi sektor industri. Peningkatan nilai produksi sektor industri akan meningkat manakala industri mampu menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi dan berdaya saing sehingga mampu masuk dalam pasar Global dan salah satu upayanya melalui hilirisasi sumberdaya unggulan Jawa Tengah menjadi produk yang lebih bernilai. Strategi lainnya dalam meningkatkan nilai produksi adalah peningkatan kapasitas produksi dari industri eksisting dan dorongan bagi industri-industri baru agar mampu berproduksi menjadi strategi yang akan dilaksanakan dalam periode 2025-2029.

2. **Meningkatkan kapasitas dan produktifitas SDM industri**

   Industri di Jawa Tengah didominasi oleh industri padat karya sehingga ketersediaan sumber daya manusia menjadi syarat wajib ketika ingin meningkatkan produktifitas sektor industri. Bersumber dari data SIINAS tahun 2024 yang telah di olah, terkait SDM industri yang didominasi oleh lulusan SMA kebawah. SDM dengan pendidikan formal D1 ke atas jumlah totalnya masih di bawah jumlah pekerja dengan jenjang pendidikan SD. Rendahnya tingkat pendidikan formal yang di dukung dengan keterbatasan ketrampilah SDM yang ada di Jawa Tengah menjadi kendala yang cukup signifikan. Rendahnya kapasitas SDM berbanding lurus dengan tingkat produktifitas SDM dalam proses produksi, sehingga apabila produktifitas industri akan ditingkatkan maka langkah utamanya adalah mendorong peningkatan produktifitas SDM dengan mengupgrade kompetensi dan ketrampilannya.

3. **Penguatan Pasar Produk hasil industri**

   Salah satu penyebab tidak berkembangnya industri adalah manakala produk hasil industri tidak dapat masuk atau tidak memiliki pasar,

untuk itu pasar produk harus selalu dikembangkan. Ekspansi pasar dan ketepatan metode promosi produk menjadi satu rangkaian kegiatan yang memiliki peran penting dalam eksistensi industri. Perluasan pasar akan membuka peluang untuk meningkatkan permintaan atas produk hasil industri yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai produksi sektor industri. Promosi produk yang tepat sasaran dan meluas juga akan membuka peluang pembukaan pasar-pasar baru.

4. **Pengembangan infrastruktur industri**

Pengembangan infrastruktur industri dapat menjadi pematik dalam pengembangan industri. Dukungan infrastruktur industri dalam updating teknologi dan inovasi perlu dilakukan agar industri mampu menjawab kebutuhan pasar atas kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkannya. Pengembangan infrastuktur di harapkan mampu meningkatkan nilai tambah ataupun memperbaiki proses pada setiap rantai produksi. Dukungan infrastruktur pendukung juga akan mempermudah proses logistik dan distribusi produk yang pada akhirnya dapat membantu menurunkan biaya dari sebuah produk sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dari sisi harga produk yang bersaing.

Urusan perindustrian juga memiliki sasaran lain yang harus dicapai dalam upaya transformasi social yaitu pengurangan tingkat pengangguran terbuka melalui upaya peningkatan Jumlah Tenaga Kerja yang di serap oleh Industri Tekstil dan Alas Kaki yang akan dicapai dengan langkah strategis yaitu:

5. **Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri tekstil dan alas kaki**

Kontribusi terbesar industri di Jawa Tengah berasal dari industri tekstil dan alas kaki, dukungan pemerintah untuk industri tersebut adalah kemudahan dan fasilitas yang dibutuhkan industri untuk mengembangkan usahanya, salah satunya dengan ketersediaan tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk bisa menyediakan tenaga kerja siap dan ingin bekerja pada industri tersebut. Permasalahan saat ini terkait ketersediaan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang tersedia belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri tektil dan alas kaki serta peminatan tenaga kerja untuk bekerja di sector tersebut cukup rendah karena dinilai beban kerja sangat tinggi yang tidak sepadan dengan pendapatan yang akan di perolehnya. Tugas pemerintah untuk mampu mendorong penyerapan tenaga kerja pada sector industri tektil dan alas kaki dapat meningkat sehingga menurunkan jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah.

A.2. Urusan Perdagangan

Sasaran untuk urusan perdagangan adalah meningkatnya PDRB sektor perdagangan dalam PDRB dicapai dengan beberapa langkah strategis yaitu :

1. **Meningkatkan daya saing produk dalam negeri**

   Peningkatan daya saing produk dalam negeri khususnya produk unggulan Jawa Tengah adalah syarat utama penyerapan produk dipasar secara optimal. Produk yang diperdagangkan harus mampu menjawab kebutuhan pasar baik dari sisi harga, kualitas dan kuantitas. Sehingga peningkatan daya saing produk di Jawa Tengah harus berfokus pada tiga hal tersebut yaitu harga, kualitas dan kuantitas.

2. **Peningkatan kapasitas dan produktifitas SDM perdagangan**

   Peningkatan kapasitas SDM di bidang perdagangan sangat dibutuhkan mengingat perkembangan teknologi dan digitalisasi di sektor tersebut sangat cepat. Metode perdagangan yang masih tradisional dimana pembeli harus bertemu penjual dan melihat produk secara langsung sudah tidak mampu menjawab trend saat ini. Untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi ini diperlukan SDM yang memiliki kapasitas dan ketrampilan yang sesuai, sehingga update informasi, pengetahuan dan ketrampilan bagi pelaku usaha perdagangan sangat diperlukan.

3. **Peningkatan Efisiensi rantai distribusi**

   Efisiensi rantai distribusi perdagangan menjadi hal yang wajib dipenuhi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan sector perdagangan. Efisiensi rantai distribusi dapat mempengaruhi harga dan kecepatan perputaran barang. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana perdagangan yang dapat mendorong terlaksananya efisiensi rantai perdagangan. Optimalisasi trend digitalisasi dalam perdagangan saat ini juga harus didukung dengan penyiapan regulasi dan kelembagaan terkait metode perdagangan yang saat ini lebih banyak diminati oleh pembeli.

4. **Penguatan Pasar produk unggulan Jawa Tengah**

   Pasar adalah tujuan akhir dari sebuah produk yang dihasilkan. Memastikan bahwa semua produk yang dihasilkan Jawa Tengah dapat terserap pasar menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga penguatan pasar perlu dilakukan. Penguatan pasar dapat dilakukan dengan penguatan pasar yang sudah ada dan perluasaan pasar baru yang potensial.

Urusan perdagangan selain mendukung pertumbuhan dan kontribusi sector unggulan Jawa Tengah, juga untuk mendukung peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah. Upaya pengendalian inflasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

5. Penurunan disparitas harga antar wilayah di Jawa Tengah

Menjaga kestabilan perbedaan harga antar wilayah merupakan upaya pengendalian inflasi yang cukup efektif untuk menekan peredaran stok barang ke daerah-daerah yang memiliki harga jual tinggi sehingga berdampak pada kelangkaan stok barang di daerah lain. Upaya stabilisasi harga antar wilayah dilakukan dengan pemantauan dan pengawasan harga dan stok barang serta melibatkan stake holder lain dalam penyediaan infrastruktur pendukung perdagangan seperti akses jalan dan transportasi.

B. Arah Kebijakan

B.1. Urusan Perindustrian

Arah kebijakan untuk pelaksanaan strategi sektor perindustrian adalah :

Strategi 1: Meningkatkan nilai produksi industri

1. Penumbuhan dan perluasan usaha industri

Kebijakan penumbuhan dan perluasan industri secara operasional dapat dilakukan dengan cara penumbuhan-penumbuhan usaha wirausaha baru di semua kalangan masyarakat dan kolaborasi dalam memberi kemudahan informasi terkait regulasi investasi dan perijinan berusaha,.

2. Peningkatan daya saing produk

Kebijakan peningkatan daya saing produk dilakukan melalui penguatan inovasi dalam pengembangan dan diversifikasi produk untuk mendorong tumbuhnya industri, serta melalui hilirisasi industri. Hilirisasi ini difokuskan pada pengembangan sumber daya unggulan di Jawa Tengah, yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan, agar memiliki nilai tambah, berdaya saing, dan mampu terserap pasar. Sejalan dengan itu, penguatan bahan baku serta dorongan terhadap pelaksanaan hilirisasi sumber daya potensial Jawa Tengah menjadi langkah penting agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah lebih tinggi, dapat memenuhi kebutuhan pasar, sekaligus menimbulkan efek domino berupa kemajuan dan kemandirian wilayah pedesaan.

3. Pemenuhan standarisasi industri dan produk hasil industri

Kebijakan pemenuhan standarisasi industri dan produk hasil industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai produk yang dihasilkan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pendampingan implementasi standarisasi green industri serta pemenuhan standarisasi produk seperti halal, pemenuhan TKDN, kepemilikan hak kekayaan intelektual (merk) dan standarisasi pangan industri rumah tangga (P-IRT)

4. **Penyediaan bahan baku industri**

   Kontuniuitas produksi dan kemampuan industri memenuhi permintaan pasar juga menjadi nilai tambah dalam upaya meningkatkan nilai produksi industri. Permasalahan saat ini adalah ketersediaan bahan baku yang terbatas dan ketergantungan impor atas bahan baku. Kebijakan penyediaan bahan baku dapat ditempuh melalui mendorong IKM untuk mampu memproduksi barang-barang substitusi impor yang merupakan bahan baku industri level atasnya. Bekerjasama untuk membangun sector hulu dalam meningkatkan produktifitasnya sehingga mampu menghasilkan bahan baku industri.

Strategi 2: Meningkatkan Kapasitas dan Produktifitas SDM Industri

1. **Peningkatan kompetensi dan ketrampilan SDM siap kerja**

   Kebijakan peningkatan kompetensi dan ketrampilan SDM diimplementasikan melalui pemberian pelatihan, sertifikasi serta uji kompetensi. Sasaran implementasi kebijakan ini adalah tenaga kerja yang tersedia namun belum memiliki kompetensi standar industri.

   penyusunan program pendidikan / pelatihan yang memungkinkan diikuti oleh pekerja industri, dan meningkatkan keterampilan pekerja industri melalui pelatihan.

2. **Peningkatan kompetensi dan ketrampilan SDM industri**

   Kebijakan ini lebih bertujuan untuk peningkatan produktifitas SDM industri eksisting. Keterbatasan investasi membuat industri kurang memperhatikan pengembangan SDM yang dimiliki yang berdampak pada penurunan produktifitas kinerja SDM. Implementasi kebijakan ini yaitu melalui penyusunan program program pelatihan atau sertifikasi yang memungkinkan untuk dapat diikuti oleh pekerja aktif sector industri.

3. **Penguatan kelembagaan industri**

   Penguatan kelembagaan industri akan mendorong industri untuk memiliki SDM yang handal sehingga mampu mengikuti perkembangan regulasi sector industri dan teknologi industri yang dinamis. Dukungan penguatan kelembagaan dengan penyampaian updating informasi terkait regulasi dan pengembangan tecnologi yang dapat diimplementasikan industri agar lebih produktif dan efisien dalam proses bisnisnya dan dengan peningkatan kompetensi SDM industri agar selalu update data dan informasi terkait industri sehingga dapat meningkatkan kepatuhan industri pada regulasi yang berlaku.

Strategi 3: Penguatan Pasar Produk Hasil Industri

1. **Ekspansi pasar dan penguatan promosi produk hasil industri**

   Perluasan pasar dan penguatan promosi merupakan kebijakan yang bertujuan membuka peluang produk hasil industri dapat terserap habis di pasar baik dalam maupun luar negeri. Kebijakan ini ditempuh melalui partisipasi aktif dalam pameran pameran produk unggulan dan ekspansi pasar melalui pengembangan metode metode

pemasaran yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini seperti pemanfaatan digital market dalam pemasaran sehingga jangkauan pasar akan semakin besar.

2. **Penguatan konektivitas hulu dan hilir industri**

   Penguatan konektivitas hulu dan hilir selain dapat memperkuat pasar hasil industri juga merupakan upaya penguatan rantai pasok industri. Melalui arah kebijakan ini diharapkan industri Jawa Tengah dapat memperkuat pasar dalam negeri dan menjadi penguat rantai pasok industri nasional. Kebijakan ini dilakukan melalui pengembangan kemitraan antar sector industri.

3. **Peningkatan kerjasama antar daerah atau negara**

   Kebijakan untuk mendukung penguatan pasar adalah peningkatan kerjasama baik antar daerah, daerah dan swasta, maupun antar negara negara, daerah maupun sektor swasta. Implementasi kebijakan ini dapat dilakukan melalui jalinan kerjasama antar negara melalui program sister province, mendorong pemerintah pusat dalam meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang berpotensi menjadi pasar produk unggulan Jawa Tengah, dan kerjasama antar daerah untuk saling dukung penguatan industri.

Strategi 4: Penguatan infrastruktur industri

1. **Pemetaan perwilayahan industri**

   Pemetaan perwilayahan industri akan mempermudah identifikasi dan pemenuhan sarana prasarana pendukung industri. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui mendorong adanya kebijakan yang mendukung pengembangan kawasan industri dan peruntukan industri serta mendorong kawasan-kawasan tersebut agar berorientasi pada lingkungan dalam proses bisnisnya.

2. **Pengembangan data dan informasi industri**

   Penyediaan data yang akurat dan akutabel menjadi dasar pemetaan kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri di Jawa Tengah. Kebijakan ini akan dilakukan melalui dorongan pelaku industri dalam penggunaan SIINas dan tertib penyampaian laporan pelaksanaan usaha, sehingga updating data industri dapat terus dilaksanakan dan menghasilkan informasi yang akuntabel.

3. **Pengembangan sarana prasarana industri**

   Pengembangan inovasi dan teknologi yang dpat diimplementasikan dalam sarana prasarana yang digunakan sektor industri dapat meningkatkan produktifitas sektor industri

Strategi 5: Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri tekstil dan alas kaki

1. **Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM siap kerja bagi industri tekstil dan alas kaki**

   Minat pasar tenaga kerja untuk bekerja diindustri tekstil dan alas kaki masih sangat rendah, untuk itu pemerintah perlu menjaring

masyarakat usia kerja untuk dapat dipersiapkan dari sisi ketrampilan dan soft skillnya. Penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja ke industri.

B.2. Urusan Perdagangan

Arah kebijakan untuk pelaksanaan strategi sektor perdagangan adalah :

Strategi 1: Meningkatnya daya saing produk dalam negeri

1. **Peningkatan daya saing harga, kualitas dan ketersediaan produk dalam negeri**

   Peningkatan daya saing produk dalam negeri mencakup 3 (tiga) aspek yaitu harga, kualitas dan kuantitas produk. Daya saing harga dapat dilakukan dengan mengurangi beban biaya produksi dan distribusi sehingga tidak membebani produk serta adanya regulasi atas harga eceran tertinggi pada suatu produk. Peningkatan daya saing kualitas produk dengan pemenuhan standarisasi produk dan peningkatan layanan terkait pemenuhan kualitas/mutu barang beredar. Peningkatan daya saing kuantitas produk dengan memastikan ketersediaan sumber daya pendukung proses produksi dan regulasi pendistribuasiannya sehingga peredaran stok barang tidak terhenti pada satu mata rantai yang mengakibatkan kelangkaan produk.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan barang beredar**

   Peningkatan daya saing produk dapat didukung melalui kenijakan terkait pelayanan dan pengawasan barang yang beredar. Pemerintah harus memastikan barang beredar di masyarakat adalah produk yang aman dikonsumsi sehingga dapat meningkatkan citra produk dalam negeri. Hal tersebut akan berdampak positif bagi daya saing produk Jawa Tengah.

Strategi 2: Meningkatnya kapasitas dan produktifitas SDM perdagangan

1. **Peningkatan kompetensi dan keterampilan pelaku perdagangan**

   Peningkatan kompetensi dan keterampilan pelaku perdagangan ditempuh melalui pelaksanaan pelatihan dan pembekalan ketrampilan sektor perdagangan bagi pelaku usaha perdagangan termasuk didalamnya pengelola sarana perdagangan dan updating tecnologi dan informasi yang dapat digunakan untuk memperluas jaringan perdagangan.

2. **Pembekalan regulasi dan standarisasi usaha bidang perdagangan**

   Dinamika regulasi dan standarisasi usaha bidang perdagangan sangat cepat sehingga pemerintah harus selalu hadir dalam mensosialisasikan hal tersebut untuk penguatan kelembagaan perdagangan di Jawa Tengah. Kendala yang dihadapi pelaku usaha

perdagangan banyak dikarenakan keterlambatan penyampaian informasi dan pemahaman yang terbatas terkait regulasi.

Strategi 3: Meningkatnya Efisiensi rantai distribusi

1. **Penciptaan iklim perdagangan yang kondusif**
   Penciptaan iklim perdagangan yang kondusif baik melalui regulasi dan kemudahan kemudahan dalam perijinan menjadi daya tarik pelaku usaha perdagangan untuk menjalankan usahanya di Jawa Tengah. Perlindungan terhadap konsumen juga salah satu bentuk penciptaan iklim perdagangan yang kondusif sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi. Kedua hal tersebut diatas dapat dilakukan sebagai upaya penciptaan iklim perdagangan yang kondusif
2. **Pengembangan sarana prasarana dan informasi perdagangan**
   Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan perlu dilakukan untuk menjawab tantangan jaman seperti digitalisasi dan kebutuhan efisiensi distribusi barang. Sarana prasarana perdagangan yang lebih beragam dan dilengkapi dengan fasilitas modern yang sesuai kebutuhan akan memungkinkan pertemuan konsumen akhir dengan produsen sehingga akan memangkas rantai distribusi yang menjadi beban dari sebuah produk. Kebijakan ini akan dilakukan dengan mulai menggerakkan digitalisasi pada pasar-pasar traditional dan perbaikan layanan pada sarana perdagangan.

Strategi 4: Penguatan Pasar produk dalam negeri

1. **Pembukaan pasar non traditional baik didalam maupun luar negeri**
   Perluasan pasar dan penguatan promosi merupakan kebijakan yang bertujuan membuka peluang pasar baru (pasar non traditional) bagi produk unggulan Jawa Tengah. Kebijakan ini ditempuh melalui partisipasi aktif dalam pameran pameran produk unggulan dan ekspansi pasar melalui pengembangan metode metode pemasaran yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini seperti pemanfaatan digital market dalam pemasaran sehingga jangkauan pasar akan semakin besar.

2. **Meningkatkan kerjasama antar daerah dan antar negara**
   Kebijakan untuk mendukung penguatan pasar adalah peningkatan kerjasama baik antar daerah, daerah dan swasta, maupun antar negara negara, daerah maupun sektor swasta. Implementasi kebijakan ini dapat dilakukan melalui kerjasama antar negara melalui program sister province, mendorong pemerintah pusat dalam meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang berpotensi menjadi pasar produk unggulan Jawa Tengah, dan kerjasama antar daerah untuk saling dukung penguatan perdagangan.

Strategi 5: Penurunan disparitas harga antar wilayah

1. **Stabilisasi harga dan stok barang melalui intervensi pasar**

   Arah kebijakan untuk strategi stabilisasi disparitas harga antar wilayah adalah dengan menjaga stabilisasi harga dan stok barang dalam hal ini adalah barang kebutuhan pokok. Stabilisasi harga dan stok dilakukan dengan melakukan intervensi pasar ketika terjadi gejolak. Stabilisasi juga dilakukan dengan cara melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan stok barang di pasar maupun di distributor.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Meningkatkan PDRB Sektor Perindustrian	Meningkatkan nilai produksi sektor industri	Penumbuhan dan perluasan usaha industri
			Peningkatan daya saing produk
			Pemenuhan standarisasi industri dan produk hasil industri
			Penyediaan bahan baku industri barang substitusi impor
		Meningkatkan kapasitas dan produktifitas SDM industri	Peningkatan kompetensi dan ketrampilan SDM siap kerja
			Peningkatan kompetensi dan ketrampilan SDM industri
			Penguatan kelembagaan industri
		Penguatan Pasar Produk hasil industri	Ekspansi pasar dan penguatan promosi produk hasil industri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Penguatan konektivitas hulu dan hilir industri
			Peningkatan kerjasama antar daerah atau negara
		Pengembangan infrastruktur Industri	Pemetaan Perwilayahan Industri
			Pengembangan data dan informasi industri
			Pengembangan Sarana Prasana Industri
	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri tekstil dan alas kaki	Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM siap kerja bagi industri tekstil dan alas kaki
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatkan daya saing produk dalam negeri	Peningkatan daya saing harga, kualitas dan ketersediaan produk dalam negeri
			Peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan barang beredar
		Meningkatkan kapasitas dan produktifitas SDM perdagangan	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan pelaku perdagangan
			Pembekalan regulasi dan standarisasi usaha bidang perdagangan
		Meningkatkan Efisiensi rantai distribusi	Penciptaan iklim perdagangan yang kondusif
			Pengembangan sarana prasarana dan informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			perdagangan
		Perluasan pasar produk perdagangan	Pembukaan pasar non traditional baik didalam maupun luar negeri
			Meningkatkan kerjasama antar daerah dan antar negara
	Meningkatkan Sistem Logistik Daerah	Penurunan disparitas harga antar wilayah	Stabilisasi harga dan stok barang melalui intervensi pasar

C. Pentahapan Pelaksanaan

Implementasi strategi dan arah kebijakan akah dilakukan melalui beberapa tahapan selama masa Renstra. Detail tahapan tersampaiakan dalam tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

Pentahapan RENSTRA Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Urusan Industri				
Identifikasi potensi dan penguatan fondasi pengembangan industri	Implementasi pengembangan industri di Jawa Tengah	Akselerasi Pengembangan industri Jawa Tengah	Pembangunan rantai nilai industri	Pengembangan pemasaran dan Ekspansi pasar produk hasil industri
Urusan Perdagangan				
Penguatan daya saing produk dalam negeri	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Pengembangan pemasaran dan ekspansi pasar dalam dan luar negeri produk dalam negeri	Pengembangan sarana perdagangan	Penguatan konektifitas hulu dan hilir

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, penentuan tindak pengendalian dan evaluasi risiko. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, dilakukan pada

konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko tujuan dan sasaran dimana upaya pengendaliannya membutuhkan kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jateng dan stake holder lainnya yang terkait. Hasil identifikasi terdapat 9 (sembilan) penyataan Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 beserta hasil analisis dampak dan tindak pengendaliannya sesuai table berikut:

Tabel 3.4.
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2025 – 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinasmis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi	Pegawai OPD tidak tanggap dalam perubahan	12	Agen perubahan OPD kurang bekerja optimal	OPD kurang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM aparatur	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jateng	2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kebutuhan masyakat terkait pelayanan yang cepat dan solutif tidak terpenuhi	12	Kurang optimalisasi implementasi digitalisasi pelayanan	Penurunan kinerja pelayanan OPD	- Menyediakan layanan call center dan digitalisasi pelayanan - Melakukan sertifikasi standar pelayanan manajemen (ISO:9001)	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jateng	2025-2029
Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Kegagalan menghindari atau mengurangi dampak keterjadian resiko	9	Ketidaktepatan penentuan rencana tindak pengendalian	Dampak resiko semakin berat dan meluas	- Identifikasi dan mitigasi resiko mulai dari akar masalah penyebab risiko - Peningkatan kapasitas SDM terkait MR sehingga tepat dalam menentukan risiko dan RTP	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jateng	2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						nya - Melakukan evaluasi manajemen		
Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Laju pertumbuhan sector industri	Adanya penutupan usaha industri	12	Peningkatan jumlah industri yang memasuki sunset industri	Penurunan performa sektor industri di Jawa Tengah	- Mendorong perluasan dan pengembangan industri - Upaya penciptaan iklim berusaha yang kondusif	Pemprov Jateng dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jateng"	2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya PDRB sektor perindustrian	Nilai PDRB sector perindustrian (Milyar Rupiah)	Penurunan daya saing sektor industri	12	Penurunan daya saing produk	Kualitas dan kapasitas produksi tidak sesuai dengan permintaan pasar	Peningkatan kapasitas SDM industri terkait inovasi tecnologi dan produk, Perluasan pasar produk unggulan hasil industri Jawa Tengah	Pemprov Jateng dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jateng"	2025-2029
Meningkatnya jumlah tenaga kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja industri tekstil dan alas kaki	Kebutuhan tenaga kerja industri alas kaki dan tekstil tidak terpenuhi	16	Kapasitas SDM yang tidak memenuhi standarisasi industri alas kaki dan tekstil	Pelaku industri tekstil dan alas kaki berpindah lokasi produksi ke Provinsi lain	Pelatihan ketrampilan SDM sesuai kebutuhan industri	Pemprov Jateng dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jateng"	2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju pertumbuhan sector perdagangan	Penurunan kinerja perdagangan internastional	12	Gejolak geopolitik international	Penurunan performa sector perdagangan Jawa Tengah	Perluasan pasar dalam dan luar negeri	Pemprov Jateng dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jateng"	2025-2029
Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Nilai PDRB sector perdagangan (Milyar Rupiah)	Penurunan daya saing sektor perdagangan	12	Rendahnya daya beli masyarakat	Peningkatan kecenderungan pilihan konsumen pada barang dengan harga murah meskipun bukan produk dalam negeri dan atau barang tidak sesuai standar perlindungan konsumen	Pengawasan distribusi produk, pengawasan mutu produk, pengawasan perijinan pelaku dagang, promosi penggunaan produk dalam negri	Pemprov Jateng dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jateng"	2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya sistem logistik daerah	Koefisien Variasi Harga antara wilayah tingkat Provinsi	Ketimpangan biaya logistic pada tiap daerah	16	Tingginya ketimpangan pembangunan antar daerah	Peningkatan tingkat dan frekuensi terjadinya inflasi	- Pemantauan harga dan stok kepokmas - Operasi pasar	Pemprov Jateng dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jateng"	2025-2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan dibagi menjadi tiga kelompok. *Kesatu*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah baik dalam urusan perdagangan dan urusan industri. *Kedua*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPT/Balai tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran, namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah. *Ketiga*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Perangkat Daerah seluruh bidang dan UPT. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nama program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus disesuaikan dengan nomenklatur sebagaimana yang tertuang dalam surat Keputusan tersebut.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Urusan Perdagangan

1. Program Pengembangan Ekspor

Program ini ditujukan untuk mendorong peningkatan ekspor, informasi dan pengembangan pasar serta pengembangan perdagangan internasional. Peningkatan citra produk unggulan Jawa Tengah agar meningkat daya saing dan pangsa pasarnya juga menjadi tujuan utama program ini. Indikator capaian keberhasilan program ini adalah Ekspor Barang dan Jasa (%) dengan formulasi Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Komponen Ekspor Barang Jasa (ADHK) yang akan dicapai melalui Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi. Kegiatan tersebut didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

a. Pameran Dagang Internasional/Nasional
b. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
c. Peningkatan Citra Produk Ekspor

2. **Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**

Program ini ditujukan untuk memberi dukungan dan dorongan kepada

pelaku usaha untuk melakukan ekspor melalui pelayanan dokumen pendukung ekspor dalam hal ini SKA serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan ekspor yang dilakukan oleh eksportir Jawa Tengah yang terkait dengan dokumen dan koordinasi dengan *buyer*. Program ini juga diharapkan mampu mendukung pelaku usaha perdagangan dalam negeri melalui pengawasan dan pengendalian penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor; Pengawasan dan pengendalian penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, dan proses pemeriksaan dan pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program yaitu:

a. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API), didukung dengan 1 (satu) sub Kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA.
b. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor didukung dengan 1 (satu) sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan memiliki 3 (tiga) indikator program yaitu:

a. Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) dengan formulasi Jumlah Penerbitan Rekomendasi Minuman Berakohol Prov Jawa Tengah Tahun N dikurangi Tahun N-1 dibagi Tahun N-1 dikali 100.
b. Persentase peningkatan pelaku usaha (distributor) bahan berbahaya yang diawasi dengan formulasi Jumlah Pelaku Usaha (distributor) bahan berbahaya yang Diawasi Tahun n dikurangi Jumlah Pelaku Usaha (distributor) bahan berbahaya yang Diawasi Tahun n-1) dibagi Jumlah Pelaku Usaha (distributor) bahan berbahaya yang Diawasi Tahun n-1 dikali 100.
c. Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah dengan formulasi Jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA Prov Jawa Tengah Tahun N dikurangi Jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA Prov Jawa Tengah Tahun N-1 dibagi Jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA Prov Jawa Tengah Tahun N-1 dikali 100.

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana

distribusi perdagangan. Peningkatan kualitas melalui revitalisasi nonfisik yang meliputi revitalisasi manajemen, revitalisasi ekonomi, dan revitalisasi sosial. Revitalisasi manajemen merupakan pembenahan yang mencakup tata cara penempatan pedagang, permodalan, dan Standar Operasional Prosedur pelayanan pasar meningkatkan kualitas pasar, saat ini pasar rakyat sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi rujukan bagi pengelola pasar dalam mengelola dan memberdayakan komunitas pasar secara optimal dan professional. Peningkatan kuantitas melalui optimalisasi penggunaan sarana distribusi yang tersedia seperti Gudang SRG dan pasar lelang.

Program ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Prosentase Peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan dengan formulasi Jumlah pelaku usaha pengguna SPLT tahun N dikurangi Jumlah pelaku usaha pengguna SPLT tahun N-1 dibagi Jumlah pelaku usaha pengguna SPLT tahun N-1 dikali 100. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas dengan 3 (tiga) sub kegiatan pendukung yaitu :

1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
2. Sub Kegiatan Penataan pembinaan dan pengembangan pasar lelang komoditas
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi

4. Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini ditujukan untuk menjaga stabilisasi harga bahan pokok penting melalui pemantauan harga sebagai *early warning inflation*, menjaga ketersediaan stok barang dan intervensi pasar untuk meminimalisasi periode dan dampak terjadinya inflasi Program ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau dengan formulasi Menjaga tingkat inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau di bawah tingkat inlasi nasional yaitu 2.5% plus minus 1%. Kegiatan untuk mendukung program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagai berikut :

a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor

b. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan yang memiliki 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

    1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
    2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang

Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan citra produk dalam negeri dan meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi serta menanamkan kecintaan produk dalam negeri, Program ini memiliki indikator Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri dengan formulasi ((Jumlah omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri tahun N dikurangi Jumlah omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri tahun N-1) dibagi Jumlah omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri tahun N-1) dikali 100. Kegiatan untuk mendukung program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yaitu :

a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri. Kegiatan ini di dukung dengan 1 (satu) sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi.
b. Kegiatan Pelaksanaan pemasaran penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan ini di dukung dengan 1 (satu) sub Kegiatan yakni Fasilitasi pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
c. Kegiatan Pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan 1 (satu) sub Kegiatan yaitu Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini bertujuan untuk penyelenggaraan perlindungan konsumen, melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha. Mendorong konsumen untuk dapat menjadi konsumen cerdas mandiri dan cinta produk dalam negeri serta memberikan pelayanan bagi pelaku usaha agar dapat menjaga konsistensi dan kesesuaian Mutu produk yang beredar dengan standar dan regulasi, baik dalam maupun luar negeri. Keberhasilan program ini dicapai dengan indikator prosentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen dengan formula (indeks keberdayaan konsumen tahun ke N dikurangi indeks keberdayaan konsumen tahun ke N-1 dibagi indeks keberdayaan konsumen tahun ke N-1 kali 100). Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
    1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen.
    2. Sub Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen.
    3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan.
c. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
   1. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi.
   2. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian.
   3. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga inspeksi.

B. Urusan Industri

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri melalui penguatan Sumberdaya industri, SDM, Sarpras industri dan pengembangan perwilayahan industri. Terdapat 6 (enam) indikator dalam program ini yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan. Adapun indikator program yaitu :

1. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi (%) yang dengan formulasi Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi. Yang didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
2. Prosentase Peningkatan Jumlah pelayanan sektor industri dengan formulasi Jumlah pelayanan sektor industri tahun N dikurangi Jumlah pelayanan sektor industri tahun N-1 dibagi jumlah pelayanan sektor industri tahun N-1 dikali 100. Yang didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
3. Persentase pertumbuhan nilai produksi industri dengan formulasi Jumlah produksi industri tahun N dikurangi Jumlah produksi industri tahun N-1 dibagi jumlah produksi industri tahun N-1 dikali 100. Yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
   a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
   b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
4. Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa dengan formulasi Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa pada tahun N dikurangi jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa pada tahun N-1 dibagi jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa pada tahun N-1dikali 100. Yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

5. Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif dengan formulasi Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif pada tahun N dikurangijumlah pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif pada tahun N-1) dibagi jumlah pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif pada tahun N-1) dikali 100. Yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
   a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
   b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

6. Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki dengan formulasi Jumlah pelatihan disalurkan/ jumlah peserta dilatih. Yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
   a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri

Program ini ditujukan untuk mendorong ketersediaan informasi industri yang *riil time* yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sekaligus dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Indikator program ini yaitu Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional dengan formulasi Jumlah pelaku industri yang terdaftar dalam SIINAS tahun N dikurangi Jumlah pelaku industri yang terdaftar dalam SIINAS tahun N-1 dibagi Jumlah pelaku industri yang terdaftar dalam SIINAS tahun N-1 dikali 100. Kegiatan pendukungnya yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), yang di dukung dengan 3 (tiga) Sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
2. Sub Kegiatan Diseminasi dan publikasi data informasi serta analisis industri Provinsi melalui SIINaS.
3. Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas.

3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini ditujukan untuk mendorong pelaku usaha agar melakukan perluasan usaha dengan menfasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS, serta mengupayakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI,IPKI Kewenangan Provinsi, Program ini memiliki indikator dengan formulasi ((Jumlah pelaku Industri yang diterbitkan rekomendasi Perijinan dan Dilakukan Pengawasan tahun N dikurangi Jumlah pelaku Industri yang diterbitkan rekomendasi Perijinan dan Dilakukan Pengawasan tahun N-1) dibagi Jumlah pelaku pelaku Industri yang diterbitkan rekomendasi Perijinan dan Dilakukan Pengawasan tahun N-1) dikali 100 %, dan ((Jumlah pelaku Industri yang diterbitkan rekomendasi Perijinan dan Dilakukan Pengawasan tahun T dikurangi Jumlah pelaku Industri yang diterbitkan rekomendasi Perijinan dan Dilakukan Pengawasan tahun N-1) dibagi Jumlah pelaku pelaku Industri yang diterbitkan rekomendasi Perijinan dan Dilakukan Pengawasan tahun N-1) dikali 100 %. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Kegiatan Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), di dukung dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam SIIINas yang terintegrasi dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI,IPKI Kewenangan Provinsi.

Disperindag juga memiliki program penunjang selain program-program tersebut diatas yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan, yang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang tersebar di Sekretariat dan Balai, untuk kegiatan dimasing-masing unit tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, didukung dengan beberapa sub kegiatan yaitu :
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
   d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung dengan beberapa sub kegiatan yaitu :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, didukung dengan beberapa sub kegiatan yaitu :
   a. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, di dukung dengan 1 (satu) sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, didukung dengan beberapa sub kegiatan yaitu :
   a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, didukung dengan beberapa sub kegiatan yaitu :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   i. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   j. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, didukung dengan beberapa sub kegiatan yaitu :
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung dengan beberapa sub kegiatan yaitu :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung dengan beberapa sub kegiatan yaitu :
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Sub Kegiatan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
    c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
    e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, saling terkait antara program, kegiatan, sub kegiatan yang satu dengan lainnya dan merupakan simpul kelola yang dapat mensinergikan berbagai potensi, kekuatan dan daya dukung industri dan perdagangan. Sinergi seluruh program kegiatan dan sub kegiatan tersebut diharapkan nantinya mampu menjawab isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan untuk tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PE) *								5.436.156.000		8.274.570.000		8.274.570.000		19.936.156.000		20.186.156.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan *	%	4,16	4,3		4,5		4,7		4,9		5,1		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan **							5.436.156.000		8.274.570.000		8.274.570.000		19.936.156.000		20.186.156.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				PDRB Sektor Perdagangan **	Milyar Rupiah	230872,97	272562	5.436.156.000	284793	8.274.570.000	297723	8.274.570.000	311426	19.936.156.000	325997	20.186.156.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PERUSAHAAN ***															Perdagangan Dalam Negeri	
			Meningkatnya pelayanan perijinan sektor perdagangan	Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DTMB) dan bahan berbahaya (DTB2) ***	%	N/A	3	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor ****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya jumlah pelaku usaha Minol yang memiliki legalitas usaha	Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB ****	Unit	N/A	5	50.000.000	5	50.000.000	8	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *****	Dokumen	N/A	5	50.000.000	5	50.000.000	8	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Dalam Negeri
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN ***						348.365.000		348.365.000		348.365.000		348.365.000		348.365.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri	
			Meningkatnya jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA Jawa Tengah	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah ***	%	N/A	9	348.365.000	9,5	348.365.000	10	348.365.000	10,5	348.365.000	10,5	348.365.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) ****						348.365.000		348.365.000		348.365.000		348.365.000		348.365.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri	
			Meningkatnya Penerbitan Dokumen Keterangan Asal	Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal ****	%	N/A	5	348.365.000	5,5	348.365.000	6	348.365.000	6,5	348.365.000	6,5	348.365.000	Pokja Ekspor dan Impor	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA *****						348.365.000		348.365.000		348.365.000		348.365.000		348.365.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri	
			Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal *****	Dokumen	N/A	107000	348.365.000	109000	348.365.000	111000	348.365.000	113000	348.365.000	114000	348.365.000	Pokja Ekspor dan Impor	Bidang Perdagangan Luar Negeri Keterangan di isi 35 Kabupaten/

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Kota, JAWA TENGAH
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN ***						451.100.000		1.451.100.000		1.351.100.000		2.701.100.000		2.701.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan ***	%	N/A	3	451.100.000	5	1.451.100.000	5	1.351.100.000	6	2.701.100.000	6	2.701.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas ****						451.100.000		1.451.100.000		1.351.100.000		2.701.100.000		2.701.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi sarana distribusi	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang di fasilitasi ****	Orang	N/A	250	451.100.000	350	1.451.100.000	500	1.351.100.000	600	2.701.100.000	600	2.701.100.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi *****						371.100.000		1.371.100.000		1.271.100.000		2.521.100.000		2.621.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi *****	Laporan	N/A	1	371.100.000	1	1.371.100.000	1	1.271.100.000	1	2.521.100.000	1	2.621.100.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Dalam Negeri
		Sub Kegiatan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas						80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		*****																
			Meningkatnya Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi *****	Orang	N/A	250	80.000.000	350	80.000.000	500	80.000.000	600	80.000.000	600	80.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Dalam Negeri
		Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi *****						0		0		0		100.000.000		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang *****	Kegiatan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	100.000.000	N/A	0	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdaganga	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	n	Perdagangan Dalam Negeri
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR ***						1.041.041.000		2.579.455.000		2.479.455.000		9.541.041.000		9.541.041.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri	
			Meningkatnya Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB ADHB	Ekspor Barang dan Jasa ***	% PDRB	10,74	11,12	1.041.041.000	11,33	2.579.455.000	11,66	2.479.455.000	12,14	9.541.041.000	12,62	9.541.041.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri	
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam						1.041.041.000		2.579.455.000		2.479.455.000		9.541.041.000		9.541.041.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Provinsi ****																
			Meningkatnya Kesepakatan Kerjasama Dagang Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Dagang Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi ****	Dokumen	N/A	2	622.673.000	2	1.911.087.000	2	1.811.087.000	2	7.622.673.000	2	7.622.673.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri	
		Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional /Nasional *****						547.673.000		1.836.087.000		1.736.087.000		5.547.673.000		5.547.673.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri	
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang *****	Pelaku Usaha	N/A	10	547.673.000	10	1.836.087.000	12	1.736.087.000	12	5.547.673.000	12	5.547.673.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Luar Negeri

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan *****						75.000.000		75.000.000		75.000.000		2.075.000.000		2.075.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri	
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan *****	Pelaku Usaha	N/A	360	75.000.000	365	75.000.000	370	75.000.000	375	2.075.000.000	375	2.075.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Luar Negeri
			Meningkatnya Potensi Komoditas Ekspor yang telah ditingkatkan citra produknya	Jumlah ketersediaan informasi Ekspor Jawa Tengah ****	Dokumen	N/A	3	418.368.000	3	668.368.000	3	668.368.000	3	1.918.368.000	3	1.918.368.000	Pokja Informasi dan Analisa Pasar Luar Negeri	
		Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor *****						418.368.000		668.368.000		668.368.000		1.918.368.000		1.918.368.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri	
			Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi	Produk	N/A	4	418.368.000	4	668.368.000	4	668.368.000	4	1.918.368.000	4	1.918.368.000	Pokja Informasi dan Analisa Pasar Luar Negeri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Promosi *****														TENGAH Bidang Perdagangan Luar Negeri
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ***						931.808.000		1.231.808.000		1.431.808.000		1.681.808.000		1.931.808.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen ***	%	N/A	1,05	931.808.000	1,07	1.231.808.000	1,08	1.431.808.000	1,09	1.681.808.000	1,09	1.931.808.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota ****						806.808.000		1.106.808.000		1.306.808.000		1.556.808.000		1.806.808.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan perlindungan konsumen	Jumlah kasus yang ditangani BPSK ****	Kasus	N/A	10	681.808.000	12	981.808.000	12	1.181.808.000	13	1.431.808.000	13	1.681.808.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen *****						681.808.000		981.808.000		1.181.808.000		1.431.808.000		1.681.808.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif *****	BPSK	N/A	2	681.808.000	2	981.808.000	3	1.181.808.000	3	1.431.808.000	3	1.681.808.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Dalam Negeri
			Meningkatnya jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang aktif	Jumlah penambahan lembaga perlindungan konsumen yang aktif ****	Lembaga	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		Sub Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menyuarakan Aspirasi dan Memperjuangkan Hak Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif *****	LPKSM	N/A	33	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	36	50.000.000	36	50.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Dalam Negeri
			Tertanganinya aduan konsumen	Jumlah laporan aduan masyarakat yang tertangani ****	Laporan	N/A	10	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen *****						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Tersedianya Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani *****	Pengaduan	N/A	10	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdag

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		angan Dalam Negeri
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota ****						125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Meningkatnya jumlah barang wajib SNI sesuai ketentuan	Jumlah Barang Beredar Yang diawasi ****	Unit	N/A	105	125.000.000	110	125.000.000	115	125.000.000	120	125.000.000	120	125.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan						125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga *****																
			Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi *****	Laporan	N/A	105	125.000.000	110	125.000.000	115	125.000.000	120	125.000.000	120	125.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Dalam Negeri
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ***						1.024.262.000		1.024.262.000		1.024.262.000		1.024.262.000		1.024.262.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta ***	%	N/A	2,5	1.024.262.000	3	1.024.262.000	3,5	1.024.262.000	4	1.024.262.000	4	1.024.262.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota ****						1.024.262.000		1.024.262.000		1.024.262.000		1.024.262.000		1.024.262.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Meningkatnya jumlah Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi ****	Sertifikat	N/A	2440	924.262.000	2513	924.262.000	2600	924.262.000	2704	924.262.000	2812	924.262.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	
		Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi *****						225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan *****	Sertifikat	N/A	1000	225.000.000	1020	225.000.000	1020	225.000.000	1040	225.000.000	1040	225.000.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
		Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian *****						699.262.000		699.262.000		699.262.000		699.262.000		699.262.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan *****	Laporan	N/A	1440	699.262.000	1493	699.262.000	1580	699.262.000	1664	699.262.000	1772	699.262.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
			Meningkatnya jumlah Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	Jumlah pelaksanaan sertifikasi ****	Dokumen	N/A	21	100.000.000	22	100.000.000	23	100.000.000	24	100.000.000	25	100.000.000	Pokja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	
		Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeks	Jumlah Sertifikat Produk/person/ sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan *****	Sertifikat	N/A	21	100.000.000	22	100.000.000	23	100.000.000	24	100.000.000	25	100.000.000	Pokja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ***						639.580.000		639.580.000		639.580.000		639.580.000		639.580.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Meningkatnya layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)	%	N/A	10	639.580.000	10	639.580.000	10	639.580.000	10	639.580.000	10	639.580.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Semarang ***													Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota ****						639.580.000		639.580.000		639.580.000		639.580.000		639.580.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Meningkatnya jumlah Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi ****	Dokumen	N/A	1878	539.580.000	2866	539.580.000	2973	539.580.000	3086	539.580.000	3203	539.580.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	
		Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi *****						124.612.000		124.612.000		124.612.000		124.612.000		124.612.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan *****	Sertifikat	N/A	1811	124.612.000	2793	124.612.000	2894	124.612.000	3001	124.612.000	3118	124.612.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
		Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian *****						414.968.000		414.968.000		414.968.000		414.968.000		414.968.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan *****	Laporan	N/A	67	414.968.000	73	414.968.000	79	414.968.000	85	414.968.000	85	414.968.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Balai Penguji

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		an dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
			Meningkatnya jumlah Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	Jumlah pelaksanaan sertifikasi ****	Dokumen	N/A	5	100.000.000	6	100.000.000	8	100.000.000	9	100.000.000	10	100.000.000	Pokja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	
		Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Meningkatnya Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeks	Jumlah Sertifikat Produk/person/ sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan *****	Sertifikat	N/A	5	100.000.000	6	100.000.000	8	100.000.000	9	100.000.000	10	100.000.000	Pokja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Balai Pengujian dan Sertifikasi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI ***						950.000.000		950.000.000		950.000.000		3.950.000.000		3.950.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Meningkatnya nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri ***	%	N/A	10	950.000.000	10	950.000.000	10	950.000.000	10	3.950.000.000	10	3.950.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri ****						900.000.000		900.000.000		900.000.000		3.800.000.000		3.900.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi ****	UMKM	N/A	10	900.000.000	12	900.000.000	14	900.000.000	16	3.800.000.000	16	3.900.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi *****						900.000.000		900.000.000		900.000.000		3.800.000.000		3.900.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri *****	UMKM	N/A	10	900.000.000	12	900.000.000	14	900.000.000	16	3.800.000.000	16	3.900.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri ****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Meningkatnya jumlah produk dalam negeri yang dapat terserap dalam pasar	Jumlah Fasilitasi kemitraan ****	Kelompok	N/A	5	50.000.000	7	50.000.000	9	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi *****	UMKM	N/A	5	50.000.000	7	50.000.000	9	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ****						0		0		0		100.000.000		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Meningkatnya jumlah pengguna produk dalam negeri	Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri ****	Orang	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	100.000.000	N/A	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri *****						0		0		0		100.000.000		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Tersedianya Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Peningkatan Literasi Anak Didik, Generasi Muda dan Masyarakat Tentang Kecintaan dan Kebanggaan dalam Menggunakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	N/A	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Produk Dalam Negeri															
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (PE) *								9.025.725.000		10.025.725.000		10.225.725.000		19.825.725.000		19.825.725.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian *	%	3,52	3,95		4,1		4,25		4,4		4,55		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian **							9.025.725.000		10.025.725.000		10.225.725.000		19.825.725.000		19.825.725.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				PDRB Sektor Perindustrian **	Milyar Rupiah	615195,96	675350	9.025.725.000	703086	10.025.725.000	732387	10.225.725.000	763373	19.825.725.000	796183	19.825.725.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ***						2.136.789.000		2.136.789.000		2.136.789.000		2.636.789.000		2.636.789.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Meningkatnya pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa ***	%	N/A	6,98	2.136.789.000	7,07	2.136.789.000	7,11	2.136.789.000	7,58	2.636.789.000	7,93	2.636.789.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi ****						2.136.789.000		2.136.789.000		2.136.789.000		2.636.789.000		2.636.789.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Meningkatnya pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan ****	Pelaku Usaha	N/A	154	2.036.789.000	163	2.036.789.000	172	2.036.789.000	181	2.536.789.000	190	2.536.789.000	Pokja Pelayanan Jasa Keteknikan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri *****						2.036.789.000		2.036.789.000		2.036.789.000		2.536.789.000		2.536.789.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri *****	Dokumen	N/A	3	2.036.789.000	3	2.036.789.000	3	2.036.789.000	3	2.536.789.000	3	2.536.789.000	Pokja Pelayanan Jasa Keteknikan	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A
			Meningkatnya pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	Jumlah pelaku usaha/ binaan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna ****	Pelaku Usaha	N/A	120	100.000.000	120	100.000.000	120	100.000.000	120	100.000.000	120	100.000.000	Pokja Penerapan dan Rekayasa	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		dan Peran Serta Masyarakat *****															Kelas A	
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat *****	Dokumen	N/A	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	Pokja Penerapan dan Rekayasa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ***						900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Meningkatnya pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif ***	%	N/A	4,4	900.000.000	4,43	900.000.000	4,47	900.000.000	4,5	900.000.000	4,5	900.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Kelas A (BIKDK)	
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi ****						900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan ****	Industri	N/A	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	11	50.000.000	12	50.000.000	Pokja Industri Kreatif Digital	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat *****	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Pokja Industri Kreatif Digital	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
			Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan ****	Pelaku Usaha	N/A	125	850.000.000	150	850.000.000	175	850.000.000	200	850.000.000	225	850.000.000	Pokja Pengembangan Kemasan	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri *****						850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri *****	Dokumen	N/A	2	850.000.000	2	850.000.000	2	850.000.000	2	850.000.000	2	850.000.000	Pokja Pengembangan Kemasan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ***						3.370.876.000		4.170.876.000		4.570.876.000		7.170.876.000		7.170.876.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pemberdayaan Industri	
			Meningkatnya pertumbuhan jumlah pelaku usaha indutri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi ***	%	N/A	6,23	3.370.876.000	6,45	4.170.876.000	6,67	4.570.876.000	6,89	7.170.876.000	7,12	7.170.876.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pemberdayaan Industri	
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi ****						3.370.876.000		4.170.876.000		4.570.876.000		7.170.876.000		7.170.876.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pemberdayaan Industri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya pertumbuhan produksi indutri	Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi pengembangan industri ****	Industri	N/A	60	3.370.876.000	N/A	4.170.876.000	110	4.570.876.000	10	7.170.876.000	60	7.170.876.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pemberdayaan Industri	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat *****						3.370.876.000		4.170.876.000		4.570.876.000		7.170.876.000		7.170.876.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pemberdayaan Industri	
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat *****	Dokumen	N/A	3	3.370.876.000	3	4.170.876.000	3	4.570.876.000	3	7.170.876.000	3	7.170.876.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pemberdayaan Industri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Pemberdayaan Industri
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ***						1.495.500.000		1.495.500.000		1.495.500.000		4.495.500.000		4.495.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi indutri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri ***	%	N/A	2,1	1.495.500.000	2,3	1.495.500.000	2,4	1.495.500.000	2,5	4.495.500.000	2,6	4.495.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri	
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi ****						1.495.500.000		1.495.500.000		1.495.500.000		4.495.500.000		4.495.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri	
			Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi indutri	Jumlah Kegiatan fasiliatasi Pengembangan Teknologi Industri ****	Kegiatan	N/A	2	850.000.000	2	850.000.000	2	850.000.000	2	1.850.000.000	2	1.850.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran						850.000.000		850.000.000		850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		dan Perwilayahan Industri *****																
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri *****	Dokumen	N/A	2	850.000.000	2	850.000.000	2	850.000.000	2	1.850.000.000	2	1.850.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri
			Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi indutri	Jumlah SDM Industri Yang dilatih ****	Orang	N/A	60	645.500.000	10	645.500.000	10	645.500.000	500	2.645.500.000	500	2.645.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri *****						645.500.000		645.500.000		645.500.000		2.645.500.000		2.645.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri	
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri *****	Dokumen	N/A	2	645.500.000	3	645.500.000	3	645.500.000	3	2.645.500.000	3	2.645.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ***						656.432.000		856.432.000		656.432.000		4.156.432.000		4.156.432.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya pelayanan sektor industri	Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri ***	%	N/A	10	656.432.000	12	856.432.000	14	656.432.000	16	4.156.432.000	18	4.156.432.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi ****						656.432.000		856.432.000		656.432.000		4.156.432.000		4.156.432.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
			Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi indutri	Jumlah Sertifikasi Industri ****	Industri	N/A	57	656.432.000	75	856.432.000	90	656.432.000	107	4.156.432.000	117	4.156.432.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri *****						656.432.000		856.432.000		656.432.000		4.156.432.000		4.156.432.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri *****	Dokumen	N/A	3	656.432.000	3	856.432.000	3	656.432.000	3	4.156.432.000	3	4.156.432.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI ***						145.376.000		145.376.000		145.376.000		145.376.000		145.376.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	dan Pengendalian Industri	
			Meningkatnya Industri yang diterbitkan rekomendasi Perijinan dan Dilakukan Pengawasan	Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan ***	%	N/A	6,5	145.376.000	7	145.376.000	7,5	145.376.000	8,5	145.376.000	9	145.376.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi ****						145.376.000		145.376.000		145.376.000		145.376.000		145.376.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya jumlah Industri yang diterbitkan rekomendasi Perijinan dan Dilakukan Pengawasan	Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan ****	Laporan / Dokumen	N/A	70	145.376.000	75	145.376.000	80	145.376.000	85	145.376.000	90	145.376.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi *****						45.376.000		45.376.000		45.376.000		45.376.000		45.376.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat *****	Dokumen	N/A	4	45.376.000	4	45.376.000	4	45.376.000	4	45.376.000	4	45.376.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama	Dokumen	N/A	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL ***						320.752.000		320.752.000		320.752.000		320.752.000		320.752.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
			Meningkatnya industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional ***	%	N/A	6	320.752.000	7	320.752.000	8	320.752.000	9	320.752.000	10	320.752.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) ****						320.752.000		320.752.000		320.752.000		320.752.000		320.752.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah penambahan Industri dalam SIINAS ****	Unit	N/A	700	320.752.000	750	320.752.000	800	320.752.000	850	320.752.000	900	320.752.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) *****						130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) *****	Dokumen	N/A	4	130.000.000	4	130.000.000	4	130.000.000	4	130.000.000	4	130.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
		Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas *****						140.752.000		140.752.000		140.752.000		140.752.000		140.752.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
			Terdiseminasi dan terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas *****	Dokumen	N/A	4	140.752.000	4	140.752.000	4	140.752.000	4	140.752.000	4	140.752.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Pengem

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	dan Pengendalian Industri	bangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
		Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
			Terpantau dan Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas *****	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengaw

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		asan dan Pengendalian Industri
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan *								59.797.192.000		59.797.192.000		59.797.192.000		62.366.340.000		62.116.340.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan *	Angka	83,75	83,85		83,9		83,95		84		84,01		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan **							750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan **	Angka	3,055	3,07	750.000.000	3,08	750.000.000	3,09	750.000.000	3,1	750.000.000	3,11	750.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perindustrian	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian	%	100	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			dan Perdagangan	dan Perdagangan ***														
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****						750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	N/A	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****						300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	N/A	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****						250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	N/A	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	28	28	100.000.000	28	100.000.000	28	100.000.000	28	100.000.000	28	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	N/A	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan **							59.047.192.000		59.047.192.000		59.047.192.000		61.616.340.000		61.366.340.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan **	Angka	95,5	95,52	59.047.192.000	95,53	59.047.192.000	95,54	59.047.192.000	95,55	61.616.340.000	95,56	61.366.340.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						46.629.807.000		46.629.807.000		46.629.807.000		49.198.955.000		48.948.955.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		***																
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan ***	%	100	100	46.629.807.000	100	46.629.807.000	100	46.629.807.000	100	49.198.955.000	100	48.948.955.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						34.763.864.000		34.763.864.000		34.763.864.000		34.763.864.000		34.763.864.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	4	34.763.864.000	4	34.763.864.000	4	34.763.864.000	4	34.763.864.000	4	34.763.864.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****						33.723.864.000		33.723.864.000		33.723.864.000		33.723.864.000		33.723.864.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	N/A	200	33.723.864.000	220	33.723.864.000	240	33.723.864.000	260	33.723.864.000	280	33.723.864.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	N/A	16	20.000.000	16	20.000.000	16	20.000.000	16	20.000.000	16	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						115.040.000		115.040.000		115.040.000		115.040.000		115.040.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	4	115.040.000	4	115.040.000	4	115.040.000	4	115.040.000	4	115.040.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****						15.040.000		15.040.000		15.040.000		15.040.000		15.040.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	N/A	4	15.040.000	4	15.040.000	4	15.040.000	4	15.040.000	4	15.040.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Meningkatnya pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ****	Laporan	N/A	N/A	10.000.000	N/A	10.000.000	N/A	10.000.000	N/A	10.000.000	N/A	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	N/A	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****						91.888.000		91.888.000		91.888.000		91.888.000		91.888.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	N/A	100	91.888.000	100	91.888.000	100	91.888.000	100	91.888.000	100	91.888.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****						31.888.000		31.888.000		31.888.000		31.888.000		31.888.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****	Dokumen	N/A	2	31.888.000	2	31.888.000	2	31.888.000	2	31.888.000	2	31.888.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	N/A	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						1.836.531.000		1.836.531.000		1.836.531.000		1.836.531.000		1.836.531.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	1.836.531.000	100	1.836.531.000	100	1.836.531.000	100	1.836.531.000	100	1.836.531.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						132.026.000		132.026.000		132.026.000		132.026.000		132.026.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	2	132.026.000	2	132.026.000	2	132.026.000	2	132.026.000	2	132.026.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI	Dinas Perindustrian dan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				*****													AN	Perdagangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						4.505.000		4.505.000		4.505.000		4.505.000		4.505.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	12	4.505.000	12	4.505.000	12	4.505.000	12	4.505.000	12	4.505.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	12	330.000.000	12	330.000.000	12	330.000.000	12	330.000.000	12	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						1.586.078.000		1.586.078.000		1.886.078.000		3.855.226.000		3.905.226.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Unit	N/A	10	1.586.078.000	10	1.586.078.000	10	1.886.078.000	10	3.855.226.000	10	3.905.226.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			memiliki nilai aset	disediakan ****														
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						0		0		700.000.000		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	1	700.000.000	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						0		0		0		690.000.000		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	690.000.000	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel *****						100.000.000		100.000.000		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						986.078.000		986.078.000		586.078.000		2.565.226.000		3.305.226.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	10	986.078.000	10	986.078.000	10	586.078.000	10	2.565.226.000	10	3.305.226.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	5.000.000.000	4	5.000.000.000	4	5.000.000.000	4	5.000.000.000	4	5.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		*****																
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	2.200.000.000	12	2.200.000.000	12	2.200.000.000	12	2.200.000.000	12	2.200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						2.800.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	2	2.800.000.000	2	2.800.000.000	2	2.800.000.000	2	2.800.000.000	2	2.800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						3.226.406.000		3.226.406.000		2.926.406.000		3.526.406.000		3.226.406.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	57	3.226.406.000	57	3.226.406.000	57	2.926.406.000	57	3.526.406.000	57	3.226.406.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit	N/A	37	250.000.000	37	250.000.000	37	250.000.000	37	250.000.000	37	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajaknya *****														
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						675.000.000		675.000.000		375.000.000		975.000.000		675.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	25	675.000.000	25	675.000.000	25	375.000.000	25	975.000.000	25	675.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						351.406.000		351.406.000		351.406.000		351.406.000		351.406.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	5	351.406.000	5	351.406.000	5	351.406.000	5	351.406.000	5	351.406.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						2.754.074.000		2.754.074.000		2.754.074.000		2.754.074.000		2.754.074.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) ***	%	100	100	2.754.074.000	100	2.754.074.000	100	2.754.074.000	100	2.754.074.000	100	2.754.074.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						77.880.000		77.880.000		77.880.000		77.880.000		77.880.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	4	77.880.000	4	77.880.000	4	77.880.000	4	77.880.000	4	77.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						77.880.000		77.880.000		77.880.000		77.880.000		77.880.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	12	77.880.000	12	77.880.000	12	77.880.000	12	77.880.000	12	77.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						30.960.000		30.960.000		30.960.000		30.960.000		30.960.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	4	30.960.000	4	30.960.000	4	30.960.000	4	30.960.000	4	30.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						30.960.000		30.960.000		30.960.000		30.960.000		30.960.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	30.960.000	1	30.960.000	1	30.960.000	1	30.960.000	1	30.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						283.000.000		283.000.000		283.000.000		283.000.000		283.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	283.000.000	100	283.000.000	100	283.000.000	100	283.000.000	100	283.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	160.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	9	150.000.000	8	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provins

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		i
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	N/A	50.000.000	N/A	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						1.464.000.000		1.464.000.000		1.464.000.000		1.464.000.000		1.464.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	4	1.464.000.000	4	1.464.000.000	4	1.464.000.000	4	1.464.000.000	4	1.464.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			perangkat daerah															
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						524.000.000		524.000.000		524.000.000		524.000.000		524.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	524.000.000	12	524.000.000	12	524.000.000	12	524.000.000	12	524.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						940.000.000		940.000.000		940.000.000		940.000.000		940.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	2	940.000.000	2	940.000.000	2	940.000.000	2	940.000.000	2	940.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						748.234.000		748.234.000		748.234.000		748.234.000		748.234.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	67	748.234.000	69	748.234.000	69	748.234.000	70	748.234.000	71	748.234.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						49.300.000		49.300.000		49.300.000		49.300.000		49.300.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit	N/A	4	49.300.000	4	49.300.000	4	49.300.000	4	49.300.000	4	49.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provins

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya *****														i Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	15	560.000.000	15	560.000.000	15	560.000.000	15	560.000.000	15	560.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	7	100.000.000	7	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						12.202.000		12.202.000		12.202.000		12.202.000		12.202.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	20	12.202.000	20	12.202.000	20	12.202.000	20	12.202.000	20	12.202.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung						16.732.000		16.732.000		16.732.000		16.732.000		16.732.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****															Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	25	16.732.000	25	16.732.000	25	16.732.000	25	16.732.000	25	16.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						2.499.589.000		2.499.589.000		2.499.589.000		2.499.589.000		2.499.589.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta ***	%	100	100	2.499.589.000	100	2.499.589.000	100	2.499.589.000	100	2.499.589.000	100	2.499.589.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						78.120.000		78.120.000		78.120.000		78.120.000		78.120.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	4	4	78.120.000	4	78.120.000	4	78.120.000	4	78.120.000	4	78.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						78.120.000		78.120.000		78.120.000		78.120.000		78.120.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	5	78.120.000	5	78.120.000	5	78.120.000	5	78.120.000	5	78.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						520.500.000		520.500.000		520.500.000		520.500.000		520.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	520.500.000	100	520.500.000	100	520.500.000	100	520.500.000	100	520.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						21.500.000		21.500.000		21.500.000		21.500.000		21.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	21.500.000	1	21.500.000	1	21.500.000	1	21.500.000	1	21.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	(BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						717.719.000		717.719.000		717.719.000		717.719.000		717.719.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	13	717.719.000	7	717.719.000	11	717.719.000	10	717.719.000	11	717.719.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						667.719.000		667.719.000		567.719.000		567.719.000		567.719.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	15	667.719.000	10	667.719.000	10	567.719.000	10	567.719.000	10	567.719.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	50.000.000	N/A	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						932.000.000		932.000.000		932.000.000		932.000.000		932.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	(BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	4	4	932.000.000	4	932.000.000	4	932.000.000	4	932.000.000	4	932.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						417.000.000		417.000.000		417.000.000		417.000.000		417.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	417.000.000	4	417.000.000	4	417.000.000	4	417.000.000	4	417.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						515.000.000		515.000.000		515.000.000		515.000.000		515.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	2	515.000.000	2	515.000.000	2	515.000.000	2	515.000.000	2	515.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		OPD Provinsi
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						206.250.000		206.250.000		206.250.000		206.250.000		206.250.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	40	206.250.000	43	206.250.000	48	206.250.000	51	206.250.000	56	206.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jabatan *****																
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						32.800.000		32.800.000		32.800.000		32.800.000		32.800.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	2	32.800.000	2	32.800.000	2	32.800.000	2	32.800.000	2	32.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						0		10.000.000		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	1	10.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						30.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	30.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						16.450.000		16.450.000		16.450.000		16.450.000		16.450.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	15	16.450.000	15	16.450.000	15	16.450.000	15	16.450.000	15	16.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	20	17.000.000	20	17.000.000	20	17.000.000	20	17.000.000	20	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						2.345.390.000		2.345.390.000		2.345.390.000		2.345.390.000		2.345.390.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	(BPSMB) Semarang Kelas A	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang ***	%	100	100	2.345.390.000	100	2.345.390.000	100	2.345.390.000	100	2.345.390.000	100	2.345.390.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						61.690.000		61.690.000		61.690.000		61.690.000		61.690.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	4	61.690.000	4	61.690.000	4	61.690.000	4	61.690.000	4	61.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						61.690.000		61.690.000		61.690.000		61.690.000		61.690.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	4	61.690.000	4	61.690.000	4	61.690.000	4	61.690.000	4	61.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						361.000.000		361.000.000		361.000.000		361.000.000		361.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Kelas A	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	361.000.000	100	361.000.000	100	361.000.000	100	361.000.000	100	361.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						147.000.000		147.000.000		147.000.000		147.000.000		147.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	147.000.000	14	147.000.000	16	147.000.000	18	147.000.000	20	147.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	(BPSMB) Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						675.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000		675.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	13	675.000.000	7	675.000.000	11	675.000.000	10	675.000.000	11	675.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						625.000.000		625.000.000		625.000.000		625.000.000		625.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	625.000.000	N/A	625.000.000	N/A	625.000.000	N/A	625.000.000	2	625.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	(BPSMB) Semarang Kelas A	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	3	50.000.000	1	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah ****						619.000.000		619.000.000		619.000.000		619.000.000		619.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	4	619.000.000	4	619.000.000	4	619.000.000	4	619.000.000	4	619.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						238.000.000		238.000.000		238.000.000		238.000.000		238.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	238.000.000	4	238.000.000	4	238.000.000	4	238.000.000	4	238.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						381.000.000		381.000.000		381.000.000		381.000.000		381.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	(BPSMB) Semarang Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	3	381.000.000	3	381.000.000	3	381.000.000	3	381.000.000	3	381.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						618.700.000		618.700.000		618.700.000		618.700.000		618.700.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	84	618.700.000	90	618.700.000	100	618.700.000	106	618.700.000	116	618.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	4	33.000.000	4	33.000.000	4	33.000.000	4	33.000.000	4	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						193.000.000		193.000.000		193.000.000		193.000.000		193.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	10	193.000.000	12	193.000.000	14	193.000.000	16	193.000.000	18	193.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	(BPSMB) Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						12.700.000		12.700.000		12.700.000		12.700.000		12.700.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	20	12.700.000	22	12.700.000	24	12.700.000	26	12.700.000	28	12.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						3.100.380.000		3.100.380.000		3.100.380.000		3.100.380.000		3.100.380.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	(BIPTAK)	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK) ***	%	100	100	3.100.380.000	100	3.100.380.000	100	3.100.380.000	100	3.100.380.000	100	3.100.380.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						93.480.000		93.480.000		93.480.000		93.480.000		93.480.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	4	93.480.000	4	93.480.000	4	93.480.000	4	93.480.000	4	93.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						93.480.000		93.480.000		93.480.000		93.480.000		93.480.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	12	93.480.000	12	93.480.000	12	93.480.000	12	93.480.000	12	93.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						685.400.000		685.400.000		685.400.000		685.400.000		685.400.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	685.400.000	100	685.400.000	100	685.400.000	100	685.400.000	100	685.400.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	(BIPTAK)	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	11	16.000.000	11	16.000.000	11	16.000.000	11	16.000.000	11	16.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						456.400.000		456.400.000		456.400.000		456.400.000		456.400.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	3	456.400.000	3	456.400.000	3	456.400.000	3	456.400.000	3	456.400.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	46.000.000	12	46.000.000	12	46.000.000	12	46.000.000	12	46.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provins

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	i
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	21	150.000.000	21	150.000.000	21	150.000.000	21	150.000.000	21	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	(BIPTAK)	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	4	1.350.000.000	4	1.350.000.000	4	1.350.000.000	4	1.350.000.000	4	1.350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						475.000.000		475.000.000		475.000.000		475.000.000		475.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	475.000.000	12	475.000.000	12	475.000.000	12	475.000.000	12	475.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						875.000.000		875.000.000		875.000.000		875.000.000		875.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	875.000.000	12	875.000.000	12	875.000.000	12	875.000.000	12	875.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						786.500.000		786.500.000		786.500.000		786.500.000		786.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	64	786.500.000	63	786.500.000	64	786.500.000	63	786.500.000	65	786.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	(BIPTAK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						46.500.000		46.500.000		46.500.000		46.500.000		46.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	25	46.500.000	25	46.500.000	25	46.500.000	25	46.500.000	25	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***						1.717.952.000		1.717.952.000		1.717.952.000		1.717.952.000		1.717.952.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK) ***	%	100	100	1.717.952.000	100	1.717.952.000	100	1.717.952.000	100	1.717.952.000	100	1.717.952.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						76.080.000		76.080.000		76.080.000		76.080.000		76.080.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	1	76.080.000	1	76.080.000	1	76.080.000	1	76.080.000	1	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						76.080.000		76.080.000		76.080.000		76.080.000		76.080.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	1	76.080.000	1	76.080.000	1	76.080.000	1	76.080.000	1	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						235.000.000		235.000.000		235.000.000		235.000.000		235.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	100	235.000.000	100	235.000.000	100	235.000.000	100	235.000.000	100	235.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	33.000.000	4	33.000.000	4	33.000.000	4	33.000.000	4	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	N/A	8	150.000.000	2	150.000.000	3	150.000.000	1	150.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	100.000.000	1	100.000.000	N/A	100.000.000	N/A	100.000.000	N/A	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						855.000.000		855.000.000		855.000.000		855.000.000		855.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ****	Laporan	N/A	4	855.000.000	4	855.000.000	4	855.000.000	4	855.000.000	4	855.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						335.000.000		335.000.000		335.000.000		335.000.000		335.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	335.000.000	4	335.000.000	4	335.000.000	4	335.000.000	4	335.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						520.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	4	520.000.000	4	520.000.000	4	520.000.000	4	520.000.000	4	520.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						381.872.000		381.872.000		381.872.000		381.872.000		381.872.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	N/A	48	381.872.000	48	381.872.000	50	381.872.000	50	381.872.000	53	381.872.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	3	21.000.000	3	21.000.000	3	21.000.000	3	21.000.000	3	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel *****						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	4	10.000.000	5	10.000.000	6	10.000.000	7	10.000.000	8	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****						66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	(BIKDK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	15	66.000.000	15	66.000.000	15	66.000.000	15	66.000.000	15	66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****						0		0		0		0		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	2	260.000.000	2	260.000.000	2	260.000.000	2	260.000.000	2	260.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						11.421.000		11.421.000		11.421.000		11.421.000		11.421.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	3	11.421.000	3	11.421.000	3	11.421.000	3	11.421.000	3	11.421.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						13.451.000		13.451.000		13.451.000		13.451.000		13.451.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	20	13.451.000	20	13.451.000	20	13.451.000	20	13.451.000	20	13.451.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Disperindag Jateng, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (TPT) *								1.603.439.000		3.534.173.000		4.204.800.000		8.603.439.000		8.603.439.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian *	%	3,52	3,95		4,1		4,25		4,4		4,55		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki **							1.603.439.000		3.534.173.000		4.204.800.000		8.603.439.000		8.603.439.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja industri teksil dan alas kaki **	%	N/A	0,32	1.603.439.000	0,34	3.534.173.000	0,37	4.204.800.000	0,39	8.603.439.000	0,44	8.603.439.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ***						1.603.439.000		3.534.173.000		4.204.800.000		8.603.439.000		8.603.439.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Meningkatnya peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki ***	%	N/A	86	1.603.439.000	87	3.534.173.000	88	4.204.800.000	89	8.603.439.000	89	8.603.439.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi ****						1.603.439.000		3.534.173.000		4.204.800.000		8.603.439.000		8.603.439.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Meningkatnya jumlah peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil ****	Orang	N/A	300	1.023.439.000	500	2.954.173.000	500	3.624.800.000	2000	8.023.439.000	2000	8.023.439.000	Pokja Pengembangan Produk Tekstil	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri *****						1.023.439.000		2.954.173.000		3.624.800.000		8.023.439.000		8.023.439.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri *****	Dokumen	N/A	1	1.023.439.000	1	2.954.173.000	1	3.624.800.000	1	8.023.439.000	1	8.023.439.000	Pokja Pengembangan Produk Tekstil	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)
			Meningkatnya jumlah peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki ****	Orang	N/A	200	580.000.000	300	580.000.000	300	580.000.000	500	580.000.000	500	580.000.000	Pokja Pengembangan Produk Alas Kaki	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat *****						580.000.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat *****	Dokumen	N/A	1	580.000.000	1	580.000.000	1	580.000.000	1	580.000.000	1	580.000.000	Pokja Pengembangan Produk Alas Kaki	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (INF) *								5.431.100.000		5.431.100.000		5.431.100.000		8.831.100.000		8.831.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan *	%	4,16	4,3		4,5		4,7		4,9		5,1		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya Sistem Logistik Daerah **							5.431.100.000		5.431.100.000		5.431.100.000		8.831.100.000		8.831.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi **	%	N/A	6,6	5.431.100.000	6,5	5.431.100.000	6,4	5.431.100.000	6,3	8.831.100.000	6,2	8.831.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING ***						5.431.100.000		5.431.100.000		5.431.100.000		8.831.100.000		8.831.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Terjaganya stabilisasi harga dan stok barang di pasar	Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau ***	%	0,6	0,52	5.431.100.000	0,51	5.431.100.000	0,4	5.431.100.000	0,38	8.831.100.000	0,38	8.831.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan						91.100.000		91.100.000		91.100.000		91.100.000		91.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdaganga	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi ****															n Dalam Negeri	
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah gudang distribusi yang dilakukan pantauan stok ****	Unit	N/A	50	91.100.000	60	91.100.000	70	91.100.000	70	91.100.000	70	91.100.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor *****						91.100.000		91.100.000		91.100.000		91.100.000		91.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor *****	Laporan	N/A	3	91.100.000	3	91.100.000	3	91.100.000	3	91.100.000	3	91.100.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan ****						5.340.000.000		5.340.000.000		5.340.000.000		8.740.000.000		8.740.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Terlaksananya Pemantauan Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas ****	Lokasi	N/A	4	5.070.000.000	5	5.070.000.000	6	5.070.000.000	7	8.470.000.000	7	8.470.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****						5.070.000.000		5.070.000.000		5.070.000.000		8.470.000.000		8.470.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****	Laporan	N/A	4	5.070.000.000	5	5.070.000.000	6	5.070.000.000	7	8.470.000.000	7	8.470.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pemantauan Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar Pantauan ****	Kabupaten/Kota	N/A	35	270.000.000	35	270.000.000	35	270.000.000	35	270.000.000	35	270.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	
		Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota *****						270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota *****	Laporan	N/A	4	270.000.000	4	270.000.000	4	270.000.000	4	270.000.000	4	270.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Tabel 4.2.
Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2025-2029

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	Fasilitasi jaringan pemasaran one pesantren one product (Penumbuhan dan Pendampingan Wirausaha Baru (WUB) bagi Santri di Provinsi Jawa Tengah	2026 : 60 orang 2029 : 460 orang 2030 : 460 orang	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri/ Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Indusri Provinsi/ Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri	-
2	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Pelatihan Kemasan Produk bagi WUB Zilenial	2026 : 25 orang 2027 : 25 orang 2028 : 25 orang 2029 : 25 orang 2030 : 25 orang	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri/ Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Indusri Provinsi/ Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan	-
3	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Pelatihan WUB sektor industri (komoditas pangan) bagi kelompok perempuan	2026 : 1 kegiatan 2027 : 1 kegiatan 2028 : 1 kegiatan 2029 : 1 kegiatan 2030 : 1 kegiatan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri/ Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Indusri Provinsi/ Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri	-
4	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM	2026 : 60 Sertifikat 2027 : 60 Sertifikat 2028 : 60 Sertifikat 2029 : 60 Sertifikat 2030 : 60 Sertifikat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri/Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Indusri Provinsi/ Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	-

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
5	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Pendampingan sertifikasi HAKI bagi UMKM	2026 : 50 Merk 2027 : 50 Merk 2028 : 50 Merk 2029 : 50 Merk 2030 : 50 Merk	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri/Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Indusri Provinsi/ Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	-
6	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.	Pelatihan dan pendampingan ekspor.	2026 : 1 Kegiatan 2029 : 5 Kegiatan 2030 : 5 Kegiatan	Program Pengembangan Ekspor/Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi/ Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Bidang Perdagangan Luar Negeri	-
7	Mendorong Pengembangan Kawasan Industri berorientasi lingkungan (industri hijau)	Identifikasi dan Diseminasi informasi kawasan industri berwawasan lingkungan	2026 : 9 Kegiatan 2027 : 2 Kegiatan 2028 : 11 Kegiatan 2029 : - 2030 : -	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri/Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Indusri Provinsi/Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Industri	-
8	Revitalisasi Pasar Tradisional yang terintegrasi berbasis Digital	Digitalisasi pasar rakyat	2026 : 2 kegiatan 2027 : 3 kegiatan 2028 : 4 kegiatan 2029 : - 2030 : -	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/ Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas/ Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	-

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
9	Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Fasilitasi Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok; Pembinaan dan Pengawasan Pemantauan Harga Bahan Pokok di Kab/Kota	2026 : 3 kegiatan 2027 : 3 kegiatan 2028 : 3 kegiatan 2029 : 3 kegiatan 2030 : 3 kegiatan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting/ Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 1. Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	-
10	Pengembangan sister province	Pengiriman Produk di luar negeri	2026 : 1 kegiatan 2027 : 1 kegiatan 2028 : 1 kegiatan 2029 : 1 kegiatan 2030 : 1 kegiatan	Program Pengembangan Ekspor/ Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi/ Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Bidang Perdagangan Luar Negeri	-
11	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Pelatihan E-Commerce Bagi Pelaku Industri Kreatif	2026 : 40 orang 2027 : 40 orang 2028 : 40 orang 2029 : 40 orang 2030 : 40 orang	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri/ Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi/	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan	-

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
12	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Pameran di dalam dan Luar Negeri	2026 : 5 event 2027 : 2 Pameran LN 2028 : 2 Pameran LN 2029 : 9 Event 2030 : 13 Event	Program Pengembangan Ekspor/ Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi/ Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri/Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Indusri Provinsi/ Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1. Bidang Perdagangan Luar Negeri 2. Bidang Pemberdayaan Industri	-
13	Regulasi Pengembangan kawasan industri	Penyusunan perubahan RPIP Jawa Tengah	2026 : 1 kegiatan 2027 : - 2028 : - 2029 : - 2030 : -	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri/ Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri	-
14	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Pelatihan dan Penyaluran SDM Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki	2026 : 500 orang 2027 : 800 orang 2028 : 800 orang 2029 : 2500 orang 2030 : 2500 orang	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri/ Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi/ 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki	-

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
15	Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha	Fasilitasi registrasi Sistem Industri Nasional (SIINas) bagi Industri Kecil di Jawa Tengah	2026 : 1 kegiatan 2027 : 1 kegiatan 2028 : 1 kegiatan 2029 : 1 kegiatan 2030 : 1 kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL/ Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)/ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	-
		Verifikasi Pemenuhan Rekomendasi Teknis Pemenuhan sektor Industri	2026 : 1 kegiatan 2027 : 1 kegiatan 2028 : 1 kegiatan 2029 : 1 kegiatan 2030 : 1 kegiatan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI/ Kegitan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi/ Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	-

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Keberhasilan organisasi diukur berdasarkan tingkat capaian indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja merupakan instrumen/alat ukur berupa ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sehingga dalam penentuannya harus jelas, terukur dan mampu mengambarkan capaian unit kerja. Indikator kinerja seharusnya dapat digunakan untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post)*

Indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada unit kerja dan bidang-bidang harus sesuai dengan kewenangan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Standar pelayanan harus ditetapkan sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan meningkatkan tingkat akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan menggunakan suatu instrumen yaitu Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja pada sektor publik entitas pemerintah melalui sistem akuntabilitas kinerja sering menghadapi berbagai permasalahan khususnya dalam mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat, hal ini timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 merujuk pada indikator kinerja tujuan dan /atau sasaran yang telah tertuang dalam Bab IV.

Tabel secara lengkap penetapan indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilhat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama PD Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	4,31	3,52	3,8	3,95	4,1	4,25	4,4	4,55	

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PDRB Sektor Perindustrian	Milyar Rupiah	577429,04	615195,96	649000	675350	703086	732387	763373	796183	
2											
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	0	83,75	83,8	83,85	83,9	83,95	84	84,01	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	0	95,5	95,51	95,52	95,53	95,54	95,55	95,56	
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	0	3,055	3,06	3,07	3,08	3,09	3,1	3,11	
3											
	Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	4,31	3,52	3,8	3,95	4,1	4,25	4,4	4,55	
	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja industri teksil dan alas kaki	%	0	0	0,32	0,32	0,34	0,37	0,39	0,44	
4											
	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4,98	4,16	4,2	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	
	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	5,26	7,38	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	
5											
	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4,98	4,16	4,2	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	
	PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	230872,97	230872,97	261315	272562	284793	297723	311426	325997	

Penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 kedalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 disusun dan dapat diukur melalui indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja dimaksud adalah Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Indikator dalam tabel ini merupakan indikator kinerja kunci yang ditetapkan dalam regulasi yang mencerminkan indikator urusan penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu Permendagri Nomor 18/2020 seperti ditunjukan oleh tabel 4.4

Tabel 4.4
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Keterangan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Perdagangan									
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	9,086	4,05	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	100	70	72	74	76	78	80	
5	Presentase penyaluran pupuk bersubsidi	%	73	73,5	74	74,5	75	75,5	76	
6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Koefisien Variasi Harga Barang (Rata-Rata)	5,26	7,38	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	
	Perindustrian									
8	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	%	18,72	31,42	31,43	31,44	31,45	31,46	31,47	
9	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	80,72	80,73	80,74	80,75	80,76	80,77	80,78	

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Keterangan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
10	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengintruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Menindaklanjuti hal itu, maka perangkat daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menyusun Renstra yang selaras dengan dokumen RPJMD pada tingkat daerah provinsi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2025-2029 ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Renstra ini memuat dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam proses tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan khususnya untuk masa waktu selama 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029. Rencana Strategis ini memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan di bidang Industri dan Perdagangan. Renstra ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada RPJMD 2025-2029. Terbitnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilakukan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini juga menjadi acuan bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran dimana saat ini banyak sekali tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Renstra juga merupakan alat yang strategis untuk mengukur kinerja jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Akhirnya, semoga Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2025-2029.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini masih bersifat *flexible* dan senantiasa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya meningkatkan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan terutama dalam menjalankan perannya untuk membangun perekonomian Jawa Tengah. Komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga Renstra Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dapat terwujud.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan tentang pengesahan Renstra PD, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renstra PD khususnya untuk tahun 2025-2029. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
3. Pejabat eselon IV dan atau yang disetarakan aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;

5. Pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah setiap tahun dan realisasinya melalui DPA- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

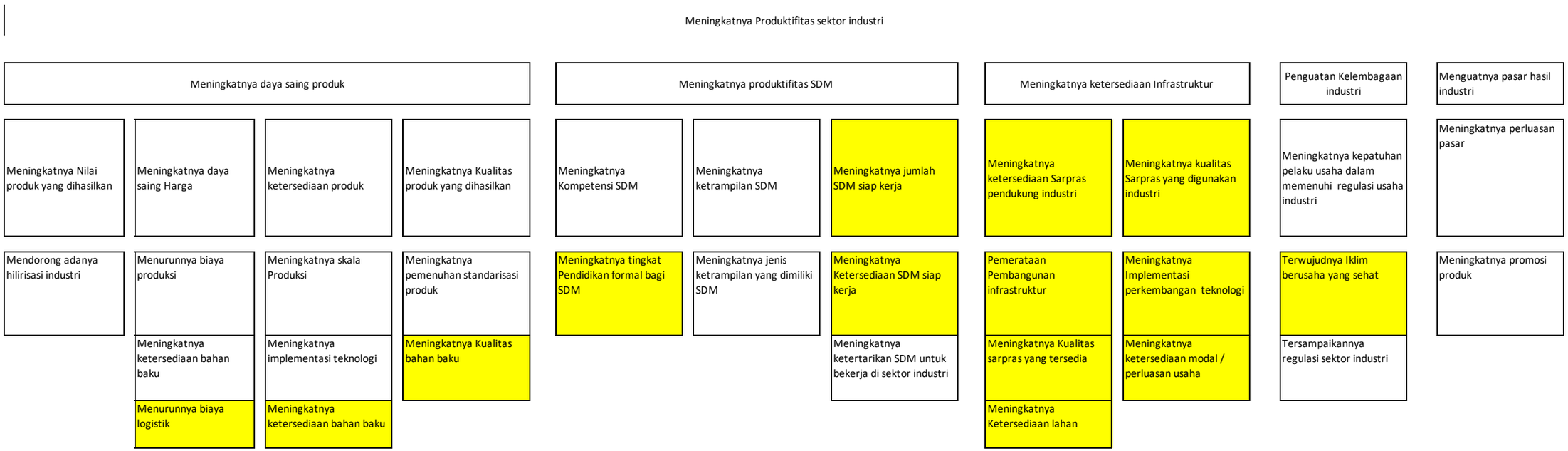

Keterangan : Warna kuning, crosscuting

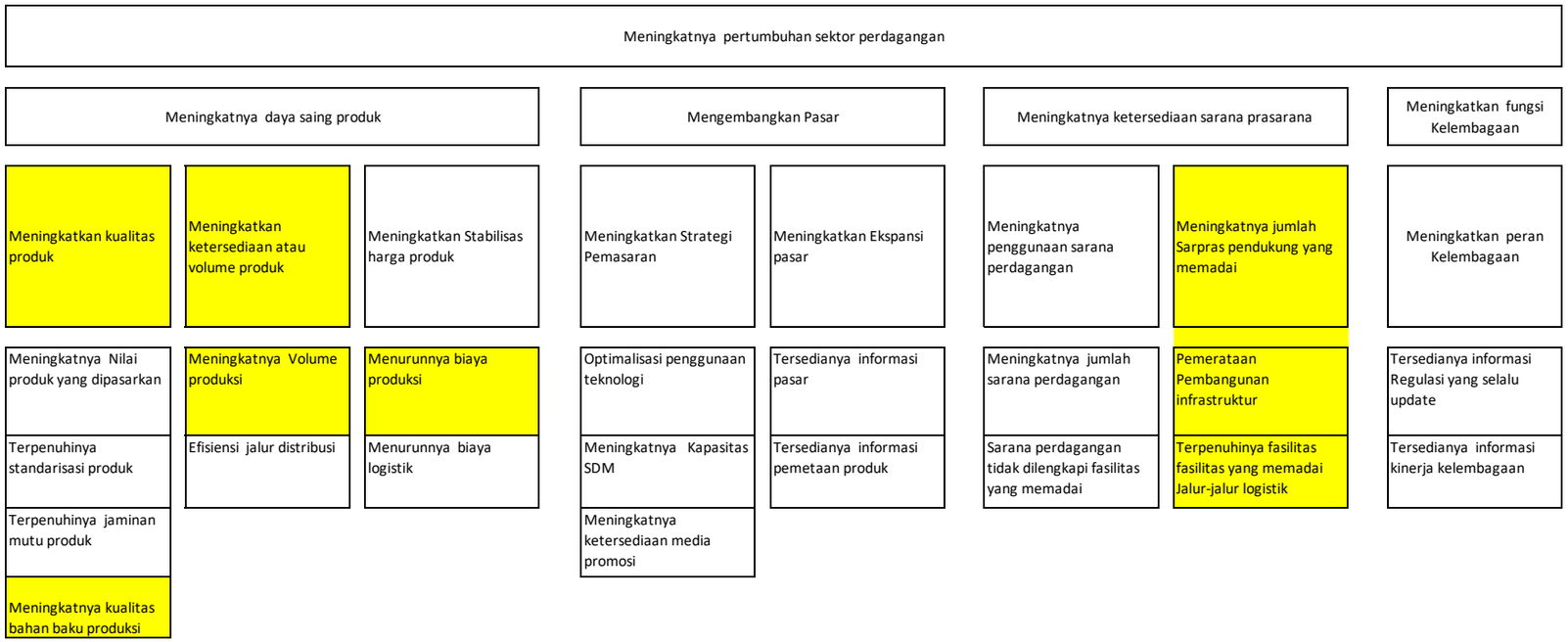

Keterangan : Warna kuning, crosscuting

	URUSAN INDUSTRI																	
TUJUAN	**Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (TPT)**		**Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (PE)**															
IK TUJUAN	**Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian** **Target (%)** **2025 : 3,80 %** **2026 : 3,95 %** **2027 : 4,10 %** **2028 : 4,25 %** **2029 : 4,40 %** **2030 : 4,55 %**		**Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian** **Target (%)** **2025 : 3,80 %** **2026 : 3,95 %** **2027 : 4,10 %** **2028 : 4,25 %** **2029 : 4,40 %** **2030 : 4,55 %**															
SASARAN	**Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki**		**Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian**															
IK SASARAN	**Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja industri teksil dan alas kaki** **Target (%)** **2025 : 0,32** **2026 : 0,32** **2027 : 0,34** **2028 : 0,37** **2029 : 0,39** **2030 : 0,44**		**PDRB Sektor Perindustrian** **Target (Milyar Rupiah)** **2025 : 649000** **2026 : 675350** **2027 : 703086** **2028 : 732387** **2029 : 763373** **2030 : 796183**															
PROGRAM	**3.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**													**3.31.03. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**		**3.31.04. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		
IK PROGRAM	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki		Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa		Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi			Persentase pertumbuhan nilai produksi industri			Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan		Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional		
TARGET IK PROGRAM	Target (%) Tahun 2025 : 85 Tahun 2026 : 86 Tahun 2027 : 87 Tahun 2028 : 88		Target (%) Tahun 2025 : 6,67 Tahun 2026 : 6,98 Tahun 2027 : 7,07 Tahun 2028 : 7,11		Target (%) Tahun 2025 : 4,39 Tahun 2026 : 4,4 Tahun 2027 : 4,43 Tahun 2028 : 4,47		2026:6,23 2027:6,45 2028:6,67 2029:6,89 2030:7,12			2026:2,1 2027:2,3 2028:2,4 2029:2,5 2030:2,6			2026:10 2027:12 2028:14 2029:16 2030:18	Target (%) Tahun 2025 : 5 Tahun 2026 : 6,5 Tahun 2027 : 7 Tahun 2028 : 7,5		Target (%) Tahun 2025 : 5 Tahun 2026 : 6 Tahun 2027 : 7 Tahun 2028 : 8		
KEGIATAN	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi													Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
IK KEGIATAN	Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil	Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki	Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan	Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan	Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi pengembangan industri	Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi promosi dan Kerjasama produk industri	Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi implementasi Idustri Hijau	Jumlah Kegiatan fasiliatasi Pengembangan Teknologi Industri	Jumlah Sentra Yang di Fasilitasi Kelembagaannya	Jumlah SDM Industri Yang dilatih	Jumlah Sertifikasi Industri	Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan		Jumlah penambahan Industri dalam SIINAS		
TARGET IK KEGIATAN	2026:300 2027:500 2028:500 2029:2.000 2030:2.000	2026:200 2027:300 2028:300 2029:500 2030:500	2026:154 2027:163 2028:172 2029:181 2030:190	2026:120 2027:120 2028:120 2029:120 2030:120	2026:10 2027:10 2028:10 2029:11 2030:12	2026:125 2027:150 2028:175 2029:200 2030:225	2026=60 2027=0 2028=110 2029=10 2030=60	2026=65 2027=80 2028=5 2029=75 2030=585	2026=103 2027=2 2028=103 2029=2 2030=2	2026=2 2027=2 2028=2 2029=2 2030=2	2026=4 2027=4 2028=4 2029=4 2030=4	2026=60 2027=10 2028=10 2029=500 2030=500	202657 202775 202890 2029107 2030117	Target (Laporan / Dokumen) Tahun 2025 : 65 Tahun 2026 : 70 Tahun 2027 : 75 Tahun 2028 : 80 Tahun 2029 : 85 Tahun 2030 : 90		Target (Unit) Tahun 2025 : 642 Tahun 2026 : 700 Tahun 2027 : 750 Tahun 2028 : 800 Tahun 2029 : 850 Tahun 2030 : 900		
SUB KEGIATAN	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	2. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	1.Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	3. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
IK SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
TARGET IK SUB KEGIATAN	Target (Dokumen) Tahun 2025 : 1 Tahun 2026 : 1 Tahun 2027 : 1 Tahun 2028 : 1 Tahun 2029 : 1 Tahun 2030 : 1	Target (Dokumen) Tahun 2025 : 1 Tahun 2026 : 1 Tahun 2027 : 1 Tahun 2028 : 1 Tahun 2029 : 1 Tahun 2030 : 1	Target (Dokumen) Tahun 2025 : 3 Tahun 2026 : 3 Tahun 2027 : 3 Tahun 2028 : 3 Tahun 2029 : 3 Tahun 2030 : 3	Target (Dokumen) Tahun 2025 : 2 Tahun 2026 : 2 Tahun 2027 : 2 Tahun 2028 : 2 Tahun 2029 : 2 Tahun 2030 : 2	Target (Dokumen) Tahun 2025 : 2 Tahun 2026 : 2 Tahun 2027 : 2 Tahun 2028 : 2 Tahun 2029 : 2 Tahun 2030 : 2	Target (Dokumen) Tahun 2025 : 1 Tahun 2026 : 1 Tahun 2027 : 1 Tahun 2028 : 1 Tahun 2029 : 1 Tahun 2030 : 1	Target (Dokumen) Tahun 2025 : 3 Tahun 2026 : 3 Tahun 2027 : 3 Tahun 2028 : 3 Tahun 2029 : 3 Tahun 2030 : 3			Target (Dokumen) Tahun 2025 : 2 Tahun 2026 : 2 Tahun 2027 : 2 Tahun 2028 : 2 Tahun 2029 : 2 Tahun 2030 : 2		Target (Dokumen) Tahun 2025 : 2 Tahun 2026 : 2 Tahun 2027 : 3 Tahun 2028 : 3 Tahun 2029 : 3 Tahun 2030 : 3	Target (Dokumen) Tahun 2025 : 3 Tahun 2026 : 3 Tahun 2027 : 3 Tahun 2028 : 3 Tahun 2029 : 3 Tahun 2030 : 3	Target (Dokumen) Tahun 2025 : 4 Tahun 2026 : 4 Tahun 2027 : 4 Tahun 2028 : 4 Tahun 2029 : 4 Tahun 2030 : 4	Target (Dokumen) Tahun 2025 : 4 Tahun 2026 : 4 Tahun 2027 : 4 Tahun 2028 : 4 Tahun 2029 : 4 Tahun 2030 : 4	Target (Dokumen) Tahun 2025 : 0 Tahun 2026 : 4 Tahun 2027 : 4 Tahun 2028 : 4 Tahun 2029 : 4 Tahun 2030 : 4	Target (Dokumen) Tahun 2025 : 4 Tahun 2026 : 4 Tahun 2027 : 4 Tahun 2028 : 4 Tahun 2029 : 4 Tahun 2030 : 4	Target (Dokumen) Tahun 2025 : 0 Tahun 2026 : 0 Tahun 2027 : 0 Tahun 2028 : 0 Tahun 2029 : 0 Tahun 2030 : 0
Crosscuting																		
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian			Kementerian Perindustrian		Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian
2	Kementerian Perindustrian	Kementerian Perindustrian	35 Kabupaten/Kota	35 Kabupaten/Kota	35 Kabupaten/Kota	35 Kabupaten/Kota	35 Kabupaten/Kota			35 Kabupaten/Kota		35 Kabupaten/Kota	35 Kabupaten/Kota	35 Kabupaten/Kota	35 Kabupaten/Kota	35 Kabupaten/Kota	35 Kabupaten/Kota	35 Kabupaten/Kota
3	35 Kabupaten/Kota	35 Kabupaten/Kota																

<table>
<tr><td colspan="24">URUSAN PERDAGANGAN</td></tr>
<tr><td rowspan="3">TUJUAN</td><td>TUJUAN</td><td colspan="22">Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan</td></tr>
<tr><td>IK TUJUAN</td><td colspan="22">Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)</td></tr>
<tr><td>TARGET TUJUAN</td><td colspan="22">2025 = 4,2
2026 = 4,3
2027 = 4,5
2028 = 4,7
2029 = 4,9
2030 = 5,1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">SASARAN</td><td>SASARAN</td><td colspan="19">Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan</td><td colspan="3">Meningkatnya Sistem Logistik Daerah</td></tr>
<tr><td>IK SASARAN</td><td colspan="19">PDRB Sektor Perdagangan (Milyar Rupiah)</td><td colspan="3">Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi **</td></tr>
<tr><td>TARGET SASARAN</td><td colspan="19">2025 = 261315
2026 = 272562
2027 = 284793
2028 = 297723
2029 = 311426
2030 = 325997</td><td colspan="3">2025 = 6,7
2026 = 6,6
2027 = 6,5
2028 = 6,4
2029 = 6,3
2030 = 6,2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PROGRAM</td><td>PROGRAM</td><td colspan="2">PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN **</td><td colspan="2">PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</td><td colspan="3">PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</td><td colspan="10">PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ***</td><td colspan="2">PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI ***</td><td colspan="3">PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING **</td></tr>
<tr><td>IK PROGRAM</td><td>Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) (%)</td><td>Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah (%)</td><td colspan="2">Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan (%)</td><td colspan="3">Ekspor Barang dan Jasa ***</td><td colspan="4">Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen (%)</td><td colspan="3">Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta (%)</td><td colspan="3">Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang (%)</td><td colspan="2">Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri ***</td><td colspan="3">Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau ***</td></tr>
<tr><td>TARGET PROGRAM</td><td>2025 = 2
2026 = 3
2027 = 5
2028 = 5
2029 = 6
2030 = 6</td><td>2025 = 8,6
2026 = 9
2027 = 9,5
2028 = 10
2029 = 10,5
2030 = 10,5</td><td colspan="2">2025 = 2
2026 = 3
2027 = 5
2028 = 5
2029 = 6
2030 = 6</td><td colspan="3">2025 = 10,97
2026 = 11,12
2027 = 11,33
2028 = 11,66
2029 = 12,14
2030 = 12,62</td><td colspan="4">2025 = 1,05
2026 = 1,05
2027 = 1,07
2028 = 1,08
2029 = 1,09
2030 = 1,09</td><td colspan="3">2025 = 2,0
2026 = 2,5
2027 = 3,0
2028 = 3,5
2029 = 4,0
2030 = 4,0</td><td colspan="3">2025 = 10
2026 = 10
2027 = 10
2028 = 10
2029 =10
2030 = 10</td><td colspan="2">2025 = 10
2026 = 10
2027 = 10
2028 = 10
2029 = 10
2030 = 10</td><td colspan="3">2025 = 0,58
2026 = 0,52
2027 = 0,51
2028 = 0,4
2029 = 0,38
2030 = 0,38</td></tr>
<tr><td rowspan="3">KEGIATAN</td><td>KEGIATAN</td><td>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor</td><td>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</td><td colspan="2">Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</td><td colspan="3">Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi ****</td><td colspan="3">Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota ****</td><td>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota ****</td><td colspan="3">Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota ****</td><td colspan="3">Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota ****</td><td>Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri ****</td><td>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri ****</td><td>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi ****</td><td colspan="2">Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan ****</td></tr>
<tr><td>IK KEGIATAN</td><td>Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB (Unit)</td><td>Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal</td><td colspan="2">Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang di fasilitasi</td><td colspan="3">Jumlah Kesepakatan Kerjasama Dagang Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi ****</td><td colspan="3">Jumlah kasus yang ditangani BPSK ****</td><td>Jumlah Barang Beredar Yang diawasi ****</td><td colspan="2">Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi</td><td>Jumlah pelaksanaan sertifikasi</td><td colspan="2">Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi</td><td>Jumlah pelaksanaan sertifikasi</td><td>Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi ****</td><td>Jumlah Fasilitasi kemitraan ****</td><td>Jumlah gudang distribusi yang dilakukan pantauan stok ****</td><td colspan="2">Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas ****</td></tr>
<tr><td>TARGET KEGIATAN</td><td>2025 = 2
2026 = 5
2027 = 5
2028 = 8
2029 = 10
2030 = 10</td><td>2025 = 4,6
2026 = 5
2027 = 5,5
2028 = 6
2029 = 6,5
2030 = 6,5</td><td colspan="2">2025 = -
2026 = 250
2027 = 350
2028 = 500
2029 = 600
2030 = 600</td><td colspan="3">2025 = 2
2026 = 2
2027 = 2
2028 = 2
2029 = 2
2030 = 2</td><td colspan="3">2025 = 10
2026 = 10
2027 = 12
2028 = 12
2029 = 13
2030 = 13</td><td>2025 = 100
2026 = 105
2027 = 110
2028 = 115
2029 = 120
2030 = 120</td><td colspan="2">2026: 2.440
2027: 2.513
2028: 2.600
2029: 2.704
2030: 2.812</td><td>2026: 21
2027: 22
2028: 23
2029: 24
2030: 25</td><td colspan="2">2027: 2.866
2028: 2.973
2029: 3.086
2030: 3.203</td><td>2026: 5
2027: 6
2028: 8
2029: 9
2030: 10</td><td>2025 = -
2026 = 10
2027 = 12
2028 = 14
2029 = 16
2030 = 16</td><td>2025 = 3
2026 = 5
2027 = 7
2028 = 9
2029 = 12
2030 = 12</td><td>2025 = 16
2026 = 50
2027 = 60
2028 = 70
2029 = 70
2030 = 70</td><td colspan="2">2025 = 3
2026 = 4
2027 = 5
2028 = 6
2029 = 7
2030 = 7</td></tr>
<tr><td rowspan="3">SUB KEGIATAN</td><td>SUB KEGIATAN</td><td>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</td><td>Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA *</td><td>Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi *****</td><td>Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas *****</td><td>Pameran Dagang Internasional/Nasional *****</td><td>Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan *****</td><td>Peningkatan Citra Produk Ekspor *****</td><td>Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen *****</td><td>Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen *****</td><td>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen *****</td><td>Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga *****</td><td>Pengembangan Layanan Kalibrasi *****</td><td>Pengembangan Layanan Pengujian *****</td><td>Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi *****</td><td>Pengembangan Layanan Kalibrasi *****</td><td>Pengembangan Layanan Pengujian *****</td><td>Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi *****</td><td>Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi *****</td><td>Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi *****</td><td>Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor *****</td><td>Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****</td><td>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota *****</td></tr>
<tr><td>IK SUB KEGIATAN</td><td>Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</td><td>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (dokumen)</td><td>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi *****</td><td>Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi *****</td><td>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang *****</td><td>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan *****</td><td>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi *****</td><td>Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif *****</td><td>Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif *****</td><td>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani *****</td><td>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi *****</td><td>Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan *****</td><td>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan *****</td><td>Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan *****</td><td>Jumlah pelaksanaan sertifikasi ****</td><td>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan *****</td><td>Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan *****</td><td>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri *****</td><td>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi *****</td><td>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor *****</td><td>Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas ****</td><td>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota *****</td></tr>
<tr><td>TARGET SUB KEGIATAN</td><td>2025 = 2
2026 = 5
2027 = 5
2028 = 8
2029 = 10
2030 = 10</td><td>2025 = 105000
2026 = 107000
2027 = 109000
2028 = 111000
2029 = 113000
2030 = 114000</td><td>2025 = 1
2026 = 1
2027 = 1
2028 = 1
2029 = 1
2030 = 1</td><td>2025 = -
2026 = 250
2027 = 350
2028 = 500
2029 = 600
2030 = 600</td><td>2025 = 8
2026 = 10
2027 = 10
2028 = 10
2029 = 12
2030 = 12</td><td>2025 = 50
2026 = 360
2027 = 365
2028 = 370
2029 = 375
2030 = 375</td><td>2025 = 4
2026 = 4
2027 = 4
2028 = 4
2029 = 4
2030 = 4</td><td>2025 = 1
2026 = 2
2027 = 2
2028 = 3
2029 = 3
2030 = 3</td><td>2025 = -
2026 = 33
2027 = 35
2028 = 35
2029 = 36
2030 = 36</td><td>2025 = 10
2026 = 10
2027 = 15
2028 = 15
2029 = 20
2030 = 20</td><td>2025 = 100
2026 = 105
2027 = 110
2028 = 115
2029 = 120
2030 = 120</td><td>2025 = 980
2026 = 1000
2027 = 1020
2028 = 1020
2029 = 1040
2030 = 1040</td><td>2025 = 1400
2026 = 1428
2027 = 1457
2028 = 1487
2029 = 1517
2030 = 1517</td><td>2025 = 20
2026 = 21
2027 = 22
2028 = 23
2029 = 24
2030 = 25</td><td>2025 = 5
2026 = 5
2027 = 6
2028 = 8
2029 = 9
2030 = 10</td><td>2025 = 61
2026 = 67
2027 = 73
2028 = 79
2029 = 85
2030 = 85</td><td>2025 = 5
2026 = 5
2027 = 6
2028 = 8
2029 = 9
2030 = 10</td><td>2025 = -
2026 = 10
2027 = 12
2028 = 14
2029 = 16
2030 = 16</td><td>2025 = 2
2026 =10
2027 = 12
2028 = 14
2029 = 16
2030 = 16</td><td>2025 = 1
2026 = 3
2027 = 3
2028 = 3
2029 = 3
2030 = 3</td><td>2025 = 3
2026 = 4
2027 = 5
2028 = 6
2029 = 7
2030 = 7</td><td>2025 = 4
2026 = 4
2027 = 4
2028 = 4
2029 = 4
2030 = 4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Crosscuting</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td>35 Kabupaten/Kota</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>35 Kabupaten/Kota</td><td></td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td>Kementerian Perdagangan;</td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>Kementerian Perdagangan;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Lampiran Manajemen Risiko

A. Identifikasi Risiko

Tabel
Identifikasi Risiko

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Risiko Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PE)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Penurunan kinerja perdagangan internastional	Risiko Strategis	Gejolak geopolitik international	Penurunan performa sector perdagangan Jawa Tengah	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah
	Risiko Sasaran	Sasaran :Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan						
			PDRB Sektor Perdagangan	Penurunan daya saing sektor perdagangan	Risiko Strategis	Rendahnya daya beli masyarakat	Peningkatan kecenderungan pilihan konsumen pada barang dengan harga murah meskipun bukan produk dalam negeri dan atau barang tidak sesuai standar perlindungan konsumen	Pelaku usaha, Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
			Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	Tidak terbitnya rekomendasi perizinan	Risiko Kepatuhan	Adanya perda pelarangan peredaran minuman beralkohol / zero minuman beralkohol di beberapa daerah tertentu	Terdapat penjualan minuman beralkohol secara ilegal	"- Masyarakat - Pemerintah"

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor						
			Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB	Pelaku usaha tidak mengajukan ijin usaha	Risiko Strategis	1. Adanya perbedaan persyaratan perijinan usaha Minol atar wilayah 2. BIaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan persyaratan administrasi sangat besar	Terdapat penjualan minuman beralkohol secara ilegal	masyarakat dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	Eksportir memilih pengurusan ijin di luar wilayah Jawa Tengah	Risiko Operasional	Komoditas eksport tidak berasal dari Jawa Tengah	Aktifitas pelayanan IPSKA Jawa Tengah menurun, sehingga meningkatkan potensi adanya penutupan IPSKA	Pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						
			Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal	Perbedaan pelayanan penerbitan SKA pada tiap eksportir	Risiko Fraud	Terdapat oknum yang menerima suap untuk penerbitan ijin SKA	Adanya pelanggaran SOP/etik dalam penerbitan SKA	Eksportir pengguna layanan IPSKA

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Program	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
			Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	Komoditas yang diperdagangkan kurang diminati	Risiko Operasional	Sarana perdagangan kurang diminati	tidak terjalin konektifitas hulu dan hilir	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						
			Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang di fasilitasi	Perbedaan kebutuhan antara buyer dan Penjual yang di hadirkan	Risiko Operasional	Ketidakcermatan menentukan penjual dan pembeli	Tidak terjadi transaksi	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ekspor Barang dan Jasa	Dokumen SKA tidak di sahkan	Resiko Operasional	Pelaku usaha belum memenuhi persyaratan pengajuan dokumen sebelumnya	Penurunan potensi ekspor	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						
			Jumlah Kesepakatan Kerjasama Dagang Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Produk yang di promosikan kurang diminati buyer	Risiko Operasional	Ketidakcermatan menentukan komoditas yang di promosikan	Tidak terjadi transaksi	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	Konsumen belum memahami hak dan kewajibannya	Risiko Operasional	1. Belum semua masyarakat menjadi konsumen cerdas 2. Pelaku usaha kurang peduli atas keselamatan konsumen	Peningkatan potensi kerugian masyarakat dalam mengkonsumsi produk	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah kasus yang ditangani BPSK	Fungsi BPSK belum optimal	Risiko Operasional	Masyarakat belum tau keberadaan BPSK	Sengketa konsumen tidak tertangani	Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Barang Beredar Yang diawasi	Tidak dilakukan penindakan bagi Pelaku usaha yang mengedarkan barang tidak sesuai standar	Risiko Fraud	terdapat oknum yang melakukan fraud untuk meloloskan barang tidak SNI, tidak berlabel dan MKG untuk dapat beredar dipasaran	konsumen mendapatkan brang yang tidak aman untuk dikonsumsi	Masyarakat selaku konsumen
				Pelaku usaha yang tidak kooperatif selama pengawasan	Risiko Operasional	Adanya potensi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha	1. Kesulitan melakukan pengawasan 2. Beredarnya barang-barang yang tidak memenuhi Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan (K3L)	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
			Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	Risiko Operasional	Adanya persaingan persaingan layanan laboratorium yang sejenis	Penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa BPSMB	UPT
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Hasil pengujian tidak akurat	Risiko Reputasi	Sarpras pengujian kurang memadai	Pelanggan memilih jasa laboratorium lain	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	Risiko Fraud	Oknum petugas memenuhi permintaan customer dengan imbalan	Layanan sertifikasi di cabut ijinnya	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
			Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	Risiko Operasional	Adanya persaingan persaingan layanan laboratorium yang sejenis	Penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa BPSMB	UPT
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Hasil pengujian tidak akurat	Risiko Reputasi	Sarpras pengujian kurang memadai	Pelanggan memilih jasa laboratorium lain	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	Risiko Fraud	Oknum petugas memenuhi permintaan customer dengan imbalan	Layanan sertifikasi di cabut ijinnya	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
			Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	Produk import menguasai pasar dalam negeri	Risiko Operasional	Produk dalam negeri kurang berdaya saing	Penurunan pasar dalam negeri untuk produk lokal	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi	Tidak dilakukan kurasi pada pelaku usaha potensial ekpor	Risiko Operasional	Tidak mendapat rekomendasi dari Kab/ Kota untuk di kurasi produknya	Pelaku usaha potensi ekspor tidak menerima fasilitasi pameran	Pemerintah, pelaku usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri						
			Jumlah Fasilitasi kemitraan	Pelaku usaha belum siap untuk bermitra	Risiko Operasional	1. Produk yang dimiliki belum mampu menjawab permintaan pasar 2. Pengelolaan Manajemen pelaku usaha belum siap untuk mendukung pengembangan usahanya	Kegagalan perluasan pasar bagi pelaku usaha perdagangan	Pelaku usaha, masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						
			Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Stand tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditawarkan	Risiko Operasional	Adanya perubahan lokasi pameran	Tidak semua produk dapat didisplay	Pemerintah, Pelaku Usaha
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (INF)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan					
	Sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya Sistem Logistik D aerah						
			Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Ketimpangan biaya logistic pada tiap daerah	Risiko Operasional	Tingginya ketimpangan pembangunan antar daerah	Peningkatan tingkat dan frekuensi terjadinya inflasi	Masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau					
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						
			Jumlah gudang distribusi yang dilakukan pantauan stok					
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas	Penetapan penyedia paket sembako murah pada e-katalog hanya pada 1(satu) penyedia	Risiko Fraud	Pemilihan penyedia yang tidak transparan atau mengarah pada penyedia tertentu	1. Tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi 2. Memperbesar potensi keterlambatan pengiriman barang	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (PE)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian					
	Sasaran Strategi	**Sasaran :Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian**						
			PDRB Sektor Perindustrian	Penurunan daya saing sektor industri	Risiko Operasional	Penurunan daya saing produk	Kualitas dan kapasitas produksi tidak sesuai dengan permintaan pasar	Pelaku usaha, masyarakat , pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	Waktu pengerjaan atau spesifikasi produk yang dihasilkan tidak sesuai	Risiko Kepatuhan	Petugas tidak melaksanakan prosedur sesuai SOP	- Kualitas hasil pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan - Hilangnya kepercayaan masyarakat atas mutu layanan BILK - Temuan mayor saat survailance ISO	Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan	terdapat perbedaan perlakuan pelayanan teknis yang diberikan oleh oknum	Risiko Fraud	terdapat pelaku usaha yang memberikan suap kepada pemberi layanan	Terdapat aduan dari pelaku usaha	Pemerintah
				sertifikasi ISO 9001 dicabut	Risiko Kepatuhan	Tidak mengajukan audit eksternal	Hilangnya kepercayaan masyarakat atas mutu layanan BILK	- Pemerintah - Masyarakat

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah pelaku usaha/ binaan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	Peserta yang hadir tidak sesuai dengan alat yang didiseminasikan	Risiko Reputasi	Tidak ada penyeleksian peserta	Informasi yang didapat tidak sesuai dengan kebutuhan	Masyarakat
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	Pengguna layanan memilih menggunakan jasa di tempat lain	Risiko Operasional	1. Munculnya pesaing usaha di sektor yang sama 2. Keterbatasan layanan BIKDK 3. Pelayanan kurang optimal	1. Perluasan pasar menjadi kurang optimal 2. Menurunnya reputasi layanan BIKDK 3. adanya aduan pengguna layanan	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Peserta inkubasi bisnis dari luar Semarang kurang berminat mengikuti pendampingan secara offline di Incubator Business Center Semarang	Risiko Operasional	Tidak tersedianya fasilitas transportasi dan akomodasi bagi peserta inkubasi bisnis	Pengembangan kompetensi SDM startup digital kurang optimal	Start Up dan Pemerintah
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan	Peserta IKM yang di fasilitasi tidak order kemasan lagi	Risiko Operasional	Lokasi IKM yang jauh dari semarang membutuhkan ongkos kirim barang kemasan yang sudah jadi	1. memperbesar potensi target PAD tidak tercapai 2. Perluasan pasar layanan BIKDK kurang optimal	IKM, Masyarakat dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	Industri tidak berhasil melakukan perluasan usaha	Risiko Strategis	Tidak memiliki permodalan	Pelaku industri menutup usahanya	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi	Nilai TKDN yang terbit tidak optimal	Risiko Operasional	Pemenuhan dokumen persyaratan TKDN belum lengkap atau melebihi dari batas waktu yang ditentukan	Kurangnya daya saing perusahaan/industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				Pelaku usaha yang difasilitasi batal mengikuti pameran	Risiko Operasional	Adanya perubahan Jadwal penyelenggaraan kegiatan yang bersifat tentative dari penyelenggara	Variasi produk yang dipamerkan tidak optimal	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penerima hibah tidak lolos verifikasi	Risiko Operasional	Tidak memenuhi persyaratan penerima hibah	Manfaat hibah tidak dirasakan calon penerima hibah	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				Kurangnya minat untuk mendaftar hingga proses sertifikasi TKDN	Risiko Operasional	1. Peserta tidak atau belum memahami pentingnya sertifikasi TKDN 2. Persyarata TKDN peserta belum lengkap atau sama sekali belum dimiliki	Kurangnya daya saing perusahaan/industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				produk industri (Furniture) kurang diminati di pasar international	Risiko Operasional	Penurunan daya saing produk agro (Furniture)	Permintaan produk industri (Furniture) menurun	Pelaku Industri, Pemerintah
				Produk IKM yang difasilitasi pameran kurang diminati oleh calon pembeli	Risiko Operasional	1. Produk industri (makanan dan minuman) Jawa Tengah belum banyak dikenal oleh masyarakat 2. Produk IKM kurang berdaya saing	1. Pemasaran produk industri (makanan dan minuman) Jawa Tengah belum maksimal 2. IKM belum berhasil memperluas pasar	Pelaku Industri, Pemerintah
				Usulan calon penerima fasilitasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Risiko Operasional	Usulan calon penerima fasilitasi belum dilakukan verifikasi awal	Penerima fasilitasi tidak tepat sasaran	Pelaku Industri, Pemerintah
				pelaku industri belum dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal	Risiko Operasional	keterbatasan informasi dan pengetahuan pelaku industri terhadap proses produksi yang menjadi salah satu persyaratan	Penundaan atau kegagalan mendapatkan sertifikat yang mengakibatkan berkurangnya capaian indikator kegiatan	Pelaku Industri, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						pengajuan sertifikasi halal		
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	Rendahnya daya saing industri	Risiko Operasional	Pelaksanaan Sosialisasi SIINas berkolaborasi dengan Kab/Kota	Meningkatkan potensi industri menutup usahanya	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah Informasi Industri	Terdapat salah input data	Risiko Operasional	Operator tidak memahami prosedur pengisian	Informasi yang tersedia tidak akurat	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	Komplain dari pelaku usaha yang tidak difasilitasi	Risiko Fraud	Oknum petugas melakukan nepotisme	IKM yang seharusnya mendapat fasilitasi tidak mendapatkan hak nya	Masyarakat , Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah Sertifikasi Industri	IKM tidak memenuhi persyaratan sertifikasi	Risiko Operasional	Hasil Kurasi IKM yang akan difasilitasi kurang tepa	Sertifikasi industri tidak terbit	Masyarakat , Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	Perusahaan tidak dapat melakukan perluasan usaha / investasi baru	Risiko Operasional	Perijinan dasar belum terpenuhi	Industri tidak memiliki legalitas kegiatan berusaha	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Industri dilakukan verifikasi secara berulang	Risiko Operasional	Industri belum memenuhi persyaratan dasar perijinan berusaha sektor industri	Membutuhkan waktu lebih untuk pemenuhan perijinan berusaha sektor industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
			Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Pelaku usaha industri tidak melaksanakan kewajiban pelaksanaan kegiatan usahanya	Risiko Operasional	1. Industri belum memahami pentingnya kepemilikan akun siinas 2. Pergantian admin SIINas pelaku usaha sangat cepat	Data pelaporan pada SIINas tidak akurat	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						
			Jumlah penambahan Industri dalam SIINAS	Peserta sosialisasi yang diadakan kab/kota yang hadir tidak sesuai kompetensi / bidang yang diharapkan	Risiko Operasional	Industri kurang mengetahui maksud tujuan kegiatan dimaksud	Pelaksanaan Kewajiban pada SIINas tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				Pelaku usaha tidak bersedia dilakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaporan	Risiko Operasional	Pelaku usaha kurang memahami pentingnya menyampaikan laporan dalam SIINas	Data laporan tahap produksi pada SIINas kurang akurat	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (TPT)**						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian					
	Sasaran Startegi	Sasaran :Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki						
			Persentase pe ningkatan jumlah tenaga kerja industri teksil dan alas kaki	Kebutuhan tenaga kerja industri alas kaki dan tekstil tidak terpenuhi	Risiko Strategis	Kapasitas SDM yang tidak memenuhi standarisasi industri alas kaki dan tekstil	Pelaku industri tekstil dan alas kaki berpindah lokasi produksi ke Provinsi lain	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha
	Sasaran Program	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	Peserta menolak penempatan	Risiko Reputasi	Lokasi penempatan jauh dari rumah dan UMK yang tidak sesuai dengan ekspektasi peserta	1. Kredibilitas BIPTAK menurun bagi industri karena tidak dapat memenuhi kuota yang di sepakati 2. Jumlah calon tenaga kerja yang akan di salurkan ke industri berkurang	Pelaku Usaha, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Perusahaan memutus kerjasama	Risiko Kemitraan	ketrampilah tenaga kerja yang dikirimkan tidak sesuai kebutuhan perusahaan	Tidak bisa lagi mengirimkan peserta pelatihan untuk bekerja di perusahaan	Masyarakat , Pemerintah
				Peserta tidak lolos seleksi perusahaan	Risiko Operasional	Ketrampilan peserta belum memenuhi standar industri	Jumlah calon tenaga kerja yang akan di salurkan ke industri berkurang	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil	terdapat monopoli vendor	Risiko Fraud	Pemilihan vendor sudah mengarah pada penyedia tertentu	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan	Peserta Pelatihan, Pemerintah, Pelaku Usaha
				Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan kebutuhan industri	Risiko Operasional	Mesin praktek yang dimiliki sudah out off date	Kualifikasi Kompetensi peserta tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Calon peserta enggan mengikuti pelatihan	Risiko Operasional	Lokasi pelaksanaan jauh dari tempat tinggal calon peserta	Pelatihan tidak optimal	Masyarakat, Pemerintah
				Peserta tidak mengikuti pelatihan hingga tuntas	Risiko Operasional	Keterbatasan fasilitas yang diberikan kepada peserta	Jumlah peserta yang lulus pelatihan berkurang	Disperindag
				Informasi pelaksanaan pelatihan (terdiri dari jadwal, persyaratan, dan teknis pelaksanaan) tidak	Risiko Operasional	Sosialisasi informasi tidak optimal	Jumlah peserta yang mendaftar kurang dari jumlah kuota pelatihan	Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				tersampaikan secara luas				
				instruktur pelatihan yang ditetapkan kurang kompeten	Risiko Operasional	Persyaratan standarisasi instruktur belum optimal	Kualifikasi kompetensi instruktur tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Disperindag
				Kurikulum pelatihan tidak sesuai kebutuhan industri saat ini	Risiko Operasional	Tidak melakukan updating kurikulum	Ketrampilan peserta setelah lulus pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan industri	Disperindag
			Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki	terdapat monopoli vendor	Risiko Fraud	Pemilihan vendor sudah mengarah pada penyedia tertentu	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan	Peserta Pelatihan, Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan kebutuhan industri	Risiko Operasional	Mesin praktek yang dimiliki sudah out off date	Kualifikasi Kompetensi peserta tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha
				Calon peserta enggan mengikuti pelatihan	Risiko Operasional	Lokasi pelaksanaan jauh dari tempat tinggal calon peserta	Pelatihan tidak optimal	Masyarakat, Pemerintah
				Peserta tidak mengikuti pelatihan hingga tuntas	Risiko Operasional	Keterbatasan fasilitas yang diberikan kepada peserta	Jumlah peserta yang lulus pelatihan berkurang	Disperindag
				Informasi pelaksanaan pelatihan (terdiri dari jadwal, persyaratan, dan teknis pelaksanaan) tidak tersampaikan secara luas	Risiko Operasional	Sosialisasi informasi tidak optimal	Jumlah peserta yang mendaftar kurang dari jumlah kuota pelatihan	Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				instruktur pelatihan yang ditetapkan kurang kompeten	Risiko Operasional	Persyaratan standarisasi instruktur belum optimal	Kualifikasi kompetensi instruktur tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Disperindag
				Kurikulum pelatihan tidak sesuai kebutuhan industri saat ini	Risiko Operasional	Tidak melakukan updating kurikulum	Ketrampilan peserta setelah lulus pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan industri	Disperindag
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan**						
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pegawai OPD tidak tanggap dalam perubahan	Risiko Operasional	Agen perubahan OPD kurang bekerja optimal	OPD kurang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kegagalan menghindari atau mengurangi dampak keterjadian resiko	Risiko Operasional	Ketidaktepatan penentuan rencana tindak pengendalian	Dampak resiko semakin berat dan meluas	Masyarakat dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Komplain pengguna layanan	Risiko Operasional	Permohonan layanan tidak terpenuhi	Penurunan kinerja instansi	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penilaian hasil evaluasi kurang akurat	Risiko Operasional	Petugas monev kurang memahami substansi monev	Kesalahan pengambilan keputusan untuk organisasi	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Kebutuhan masyakat terkait pelayanan yang cepat dan solutif tidak terpenuhi	Risiko Operasional	Kurang optimalisasi implementasi digitalisasi pelayanan	Penurunan kinerja pelayanan OPD	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Aset tidak tecover asuransi	Risiko Operasional	Aset belum tercatat	Tidak keluar uang pertanggungan asuransi karena Kerusakan aset	Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
No	**Jenis Koteks Risiko**	**Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Risiko**	**Kategori Risiko**	**Sebab**	**Dampak**	
							Uraian	**Pihak yang Terkena**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Risiko Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PE)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Penurunan kinerja perdagangan internastional	Risiko Strategis	Gejolak geopolitik international	Penurunan performa sector perdagangan Jawa Tengah	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah
	Risiko Sasaran	Sasaran :Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PDRB Sektor Perdagangan	Penurunan daya saing sektor perdagangan	Risiko Strategis	Rendahnya daya beli masyarakat	Peningkatan kecenderungan pilihan konsumen pada barang dengan harga murah meskipun bukan produk dalam negeri dan atau barang tidak sesuai standar perlindungan konsumen	Pelaku usaha, Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
			Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	Tidak terbitnya rekomendasi perizinan	Risiko Kepatuhan	Adanya perda pelarangan peredaran minuman beralkohol / zero minuman beralkohol di beberapa daerah tertentu	Terdapat penjualan minuman beralkohol secara ilegal	"- Masyarakat - Pemerintah"

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor						
			Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB	Pelaku usaha tidak mengajukan ijin usaha	Risiko Strategis	1. Adanya perbedaan persyaratan perijinan usaha Minol atar wilayah 2. BIaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan persyaratan administrasi sangat besar	Terdapat penjualan minuman beralkohol secara ilegal	masyarakat dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	Eksportir memilih pengurusan ijin di luar wilayah Jawa Tengah	Risiko Operasional	Komoditas eksport tidak berasal dari Jawa Tengah	Aktifitas pelayanan IPSKA Jawa Tengah menurun, sehingga meningkatkan potensi adanya penutupan IPSKA	Pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						
			Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal	Perbedaan pelayanan penerbitan SKA pada tiap eksportir	Risiko Fraud	Terdapat oknum yang menerima suap untuk penerbitan ijin SKA	Adanya pelanggaran SOP/etik dalam penerbitan SKA	Eksportir pengguna layanan IPSKA

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Program	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
			Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	Komoditas yang diperdagangkan kurang diminati	Risiko Operasional	Sarana perdagangan kurang diminati	tidak terjalin konektifitas hulu dan hilir	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						
			Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang di fasilitasi	Perbedaan kebutuhan antara buyer dan Penjual yang di hadirkan	Risiko Operasional	Ketidakcermatan menentukan penjual dan pembeli	Tidak terjadi transaksi	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ekspor Barang dan Jasa	Dokumen SKA tidak di sahkan	Resiko Operasional	Pelaku usaha belum memenuhi persyaratan pengajuan dokumen sebelumnya	Penurunan potensi ekspor	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						
			Jumlah Kesepakatan Kerjasama Dagang Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Produk yang di promosikan kurang diminati buyer	Risiko Operasional	Ketidakcermatan menentukan komoditas yang di promosikan	Tidak terjadi transaksi	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	Konsumen belum memahami hak dan kewajibannya	Risiko Operasional	1. Belum semua masyarakat menjadi konsumen cerdas 2. Pelaku usaha kurang peduli atas keselamatan konsumen	Peningkatan potensi kerugian masyarakat dalam mengkonsumsi produk	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah kasus yang ditangani BPSK	Fungsi BPSK belum optimal	Risiko Operasional	Masyarakat belum tau keberadaan BPSK	Sengketa konsumen tidak tertangani	Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Barang Beredar Yang diawasi	Tidak dilakukan penindakan bagi Pelaku usaha yang mengedarkan barang tidak sesuai standar	Risiko Fraud	terdapat oknum yang melakukan fraud untuk meloloskan barang tidak SNI, tidak berlabel dan MKG untuk dapat beredar dipasaran	konsumen mendapatkan brang yang tidak aman untuk dikonsumsi	Masyarakat selaku konsumen
				Pelaku usaha yang tidak kooperatif selama pengawasan	Risiko Operasional	Adanya potensi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha	1. Kesulitan melakukan pengawasan 2. Beredarnya barang-barang yang tidak memenuhi Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan (K3L)	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
			Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	Risiko Operasional	Adanya persaingan persaingan layanan laboratorium yang sejenis	Penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa BPSMB	UPT
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Hasil pengujian tidak akurat	Risiko Reputasi	Sarpras pengujian kurang memadai	Pelanggan memilih jasa laboratorium lain	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	Risiko Fraud	Oknum petugas memenuhi permintaan customer dengan imbalan	Layanan sertifikasi di cabut ijinnya	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
			Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	Risiko Operasional	Adanya persaingan persaingan layanan laboratorium yang sejenis	Penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa BPSMB	UPT
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Hasil pengujian tidak akurat	Risiko Reputasi	Sarpras pengujian kurang memadai	Pelanggan memilih jasa laboratorium lain	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	Risiko Fraud	Oknum petugas memenuhi permintaan customer dengan imbalan	Layanan sertifikasi di cabut ijinnya	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
			Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	Produk import menguasai pasar dalam negeri	Risiko Operasional	Produk dalam negeri kurang berdaya saing	Penurunan pasar dalam negeri untuk produk lokal	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi	Tidak dilakukan kurasi pada pelaku usaha potensial ekpor	Risiko Operasional	Tidak mendapat rekomendasi dari Kab/ Kota untuk di kurasi produknya	Pelaku usaha potensi ekspor tidak menerima fasilitasi pameran	Pemerintah, pelaku usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri						
			Jumlah Fasilitasi kemitraan	Pelaku usaha belum siap untuk bermitra	Risiko Operasional	1. Produk yang dimiliki belum mampu menjawab permintaan pasar 2. Pengelolaan Manajemen pelaku usaha belum siap untuk mendukung pengembangan usahanya	Kegagalan perluasan pasar bagi pelaku usaha perdagangan	Pelaku usaha, masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						
			Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Stand tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditawarkan	Risiko Operasional	Adanya perubahan lokasi pameran	Tidak semua produk dapat didisplay	Pemerintah, Pelaku Usaha
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (INF)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan					
	Sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya Sistem Logistik D aerah						
			Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Ketimpangan biaya logistic pada tiap daerah	Risiko Operasional	Tingginya ketimpangan pembangunan antar daerah	Peningkatan tingkat dan frekuensi terjadinya inflasi	Masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau					
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						
			Jumlah gudang distribusi yang dilakukan pantauan stok					
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas	Penetapan penyedia paket sembako murah pada e-katalog hanya pada 1(satu) penyedia	Risiko Fraud	Pemilihan penyedia yang tidak transparan atau mengarah pada penyedia tertentu	1. Tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi 2. Memperbesar potensi keterlambatan pengiriman barang	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (PE)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian					
	Sasaran Strategi	**Sasaran :Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian**						
			PDRB Sektor Perindustrian	Penurunan daya saing sektor industri	Risiko Operasional	Penurunan daya saing produk	Kualitas dan kapasitas produksi tidak sesuai dengan permintaan pasar	Pelaku usaha, masyarakat , pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	Waktu pengerjaan atau spesifikasi produk yang dihasilkan tidak sesuai	Risiko Kepatuhan	Petugas tidak melaksanakan prosedur sesuai SOP	- Kualitas hasil pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan - Hilangnya kepercayaan masyarakat atas mutu layanan BILK - Temuan mayor saat survailance ISO	Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan	terdapat perbedaan perlakuan pelayanan teknis yang diberikan oleh oknum	Risiko Fraud	terdapat pelaku usaha yang memberikan suap kepada pemberi layanan	Terdapat aduan dari pelaku usaha	Pemerintah
				sertifikasi ISO 9001 dicabut	Risiko Kepatuhan	Tidak mengajukan audit eksternal	Hilangnya kepercayaan masyarakat atas mutu layanan BILK	- Pemerintah - Masyarakat

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah pelaku usaha/ binaan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	Peserta yang hadir tidak sesuai dengan alat yang didiseminasikan	Risiko Reputasi	Tidak ada penyeleksian peserta	Informasi yang didapat tidak sesuai dengan kebutuhan	Masyarakat
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	Pengguna layanan memilih menggunakan jasa di tempat lain	Risiko Operasional	1. Munculnya pesaing usaha di sektor yang sama 2. Keterbatasan layanan BIKDK 3. Pelayanan kurang optimal	1. Perluasan pasar menjadi kurang optimal 2. Menurunnya reputasi layanan BIKDK 3. adanya aduan pengguna layanan	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Peserta inkubasi bisnis dari luar Semarang kurang berminat mengikuti pendampingan secara offline di Incubator Business Center Semarang	Risiko Operasional	Tidak tersedianya fasilitas transportasi dan akomodasi bagi peserta inkubasi bisnis	Pengembangan kompetensi SDM startup digital kurang optimal	Start Up dan Pemerintah
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan	Peserta IKM yang di fasilitasi tidak order kemasan lagi	Risiko Operasional	Lokasi IKM yang jauh dari semarang membutuhkan ongkos kirim barang kemasan yang sudah jadi	1. memperbesar potensi target PAD tidak tercapai 2. Perluasan pasar layanan BIKDK kurang optimal	IKM, Masyarakat dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	Industri tidak berhasil melakukan perluasan usaha	Risiko Strategis	Tidak memiliki permodalan	Pelaku industri menutup usahanya	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi	Nilai TKDN yang terbit tidak optimal	Risiko Operasional	Pemenuhan dokumen persyaratan TKDN belum lengkap atau melebihi dari batas waktu yang ditentukan	Kurangnya daya saing perusahaan/industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				Pelaku usaha yang difasilitasi batal mengikuti pameran	Risiko Operasional	Adanya perubahan Jadwal penyelenggaraan kegiatan yang bersifat tentative dari penyelenggara	Variasi produk yang dipamerkan tidak optimal	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penerima hibah tidak lolos verifikasi	Risiko Operasional	Tidak memenuhi persyaratan penerima hibah	Manfaat hibah tidak dirasakan calon penerima hibah	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				Kurangnya minat untuk mendaftar hingga proses sertifikasi TKDN	Risiko Operasional	1. Peserta tidak atau belum memahami pentingnya sertifikasi TKDN 2. Persyarata TKDN peserta belum lengkap atau sama sekali belum dimiliki	Kurangnya daya saing perusahaan/industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				produk industri (Furniture) kurang diminati di pasar international	Risiko Operasional	Penurunan daya saing produk agro (Furniture)	Permintaan produk industri (Furniture) menurun	Pelaku Industri, Pemerintah
				Produk IKM yang difasilitasi pameran kurang diminati oleh calon pembeli	Risiko Operasional	1. Produk industri (makanan dan minuman) Jawa Tengah belum banyak dikenal oleh masyarakat 2. Produk IKM kurang berdaya saing	1. Pemasaran produk industri (makanan dan minuman) Jawa Tengah belum maksimal 2. IKM belum berhasil memperluas pasar	Pelaku Industri, Pemerintah
				Usulan calon penerima fasilitasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Risiko Operasional	Usulan calon penerima fasilitasi belum dilakukan verifikasi awal	Penerima fasilitasi tidak tepat sasaran	Pelaku Industri, Pemerintah
				pelaku industri belum dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal	Risiko Operasional	keterbatasan informasi dan pengetahuan pelaku industri terhadap proses produksi yang menjadi salah satu persyaratan	Penundaan atau kegagalan mendapatkan sertifikat yang mengakibatkan berkurangnya capaian indikator kegiatan	Pelaku Industri, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						pengajuan sertifikasi halal		
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	Rendahnya daya saing industri	Risiko Operasional	Pelaksanaan Sosialisasi SIINas berkolaborasi dengan Kab/Kota	Meningkatkan potensi industri menutup usahanya	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah Informasi Industri	Terdapat salah input data	Risiko Operasional	Operator tidak memahami prosedur pengisian	Informasi yang tersedia tidak akurat	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	Komplain dari pelaku usaha yang tidak difasilitasi	Risiko Fraud	Oknum petugas melakukan nepotisme	IKM yang seharusnya mendapat fasilitasi tidak mendapatkan hak nya	Masyarakat , Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah Sertifikasi Industri	IKM tidak memenuhi persyaratan sertifikasi	Risiko Operasional	Hasil Kurasi IKM yang akan difasilitasi kurang tepa	Sertifikasi industri tidak terbit	Masyarakat , Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	Perusahaan tidak dapat melakukan perluasan usaha / investasi baru	Risiko Operasional	Perijinan dasar belum terpenuhi	Industri tidak memiliki legalitas kegiatan berusaha	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Industri dilakukan verifikasi secara berulang	Risiko Operasional	Industri belum memenuhi persyaratan dasar perijinan berusaha sektor industri	Membutuhkan waktu lebih untuk pemenuhan perijinan berusaha sektor industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
			Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Pelaku usaha industri tidak melaksanakan kewajiban pelaksanaan kegiatan usahanya	Risiko Operasional	1. Industri belum memahami pentingnya kepemilikan akun siinas 2. Pergantian admin SIINas pelaku usaha sangat cepat	Data pelaporan pada SIINas tidak akurat	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						
			Jumlah penambahan Industri dalam SIINAS	Peserta sosialisasi yang diadakan kab/kota yang hadir tidak sesuai kompetensi / bidang yang diharapkan	Risiko Operasional	Industri kurang mengetahui maksud tujuan kegiatan dimaksud	Pelaksanaan Kewajiban pada SIINas tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				Pelaku usaha tidak bersedia dilakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaporan	Risiko Operasional	Pelaku usaha kurang memahami pentingnya menyampaikan laporan dalam SIINas	Data laporan tahap produksi pada SIINas kurang akurat	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (TPT)**						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian					
	Sasaran Startegi	Sasaran :Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki						
			Persentase pe ningkatan jumlah tenaga kerja industri teksil dan alas kaki	Kebutuhan tenaga kerja industri alas kaki dan tekstil tidak terpenuhi	Risiko Strategis	Kapasitas SDM yang tidak memenuhi standarisasi industri alas kaki dan tekstil	Pelaku industri tekstil dan alas kaki berpindah lokasi produksi ke Provinsi lain	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha
	Sasaran Program	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	Peserta menolak penempatan	Risiko Reputasi	Lokasi penempatan jauh dari rumah dan UMK yang tidak sesuai dengan ekspektasi peserta	1. Kredibilitas BIPTAK menurun bagi industri karena tidak dapat memenuhi kuota yang di sepakati 2. Jumlah calon tenaga kerja yang akan di salurkan ke industri berkurang	Pelaku Usaha, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Perusahaan memutus kerjasama	Risiko Kemitraan	ketrampilah tenaga kerja yang dikirimkan tidak sesuai kebutuhan perusahaan	Tidak bisa lagi mengirimkan peserta pelatihan untuk bekerja di perusahaan	Masyarakat , Pemerintah
				Peserta tidak lolos seleksi perusahaan	Risiko Operasional	Ketrampilan peserta belum memenuhi standar industri	Jumlah calon tenaga kerja yang akan di salurkan ke industri berkurang	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil	terdapat monopoli vendor	Risiko Fraud	Pemilihan vendor sudah mengarah pada penyedia tertentu	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan	Peserta Pelatihan, Pemerintah, Pelaku Usaha
				Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan kebutuhan industri	Risiko Operasional	Mesin praktek yang dimiliki sudah out off date	Kualifikasi Kompetensi peserta tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Calon peserta enggan mengikuti pelatihan	Risiko Operasional	Lokasi pelaksanaan jauh dari tempat tinggal calon peserta	Pelatihan tidak optimal	Masyarakat, Pemerintah
				Peserta tidak mengikuti pelatihan hingga tuntas	Risiko Operasional	Keterbatasan fasilitas yang diberikan kepada peserta	Jumlah peserta yang lulus pelatihan berkurang	Disperindag
				Informasi pelaksanaan pelatihan (terdiri dari jadwal, persyaratan, dan teknis pelaksanaan) tidak	Risiko Operasional	Sosialisasi informasi tidak optimal	Jumlah peserta yang mendaftar kurang dari jumlah kuota pelatihan	Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				tersampaikan secara luas				
				instruktur pelatihan yang ditetapkan kurang kompeten	Risiko Operasional	Persyaratan standarisasi instruktur belum optimal	Kualifikasi kompetensi instruktur tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Disperindag
				Kurikulum pelatihan tidak sesuai kebutuhan industri saat ini	Risiko Operasional	Tidak melakukan updating kurikulum	Ketrampilan peserta setelah lulus pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan industri	Disperindag
			Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki	terdapat monopoli vendor	Risiko Fraud	Pemilihan vendor sudah mengarah pada penyedia tertentu	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan	Peserta Pelatihan, Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan kebutuhan industri	Risiko Operasional	Mesin praktek yang dimiliki sudah out off date	Kualifikasi Kompetensi peserta tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha
				Calon peserta enggan mengikuti pelatihan	Risiko Operasional	Lokasi pelaksanaan jauh dari tempat tinggal calon peserta	Pelatihan tidak optimal	Masyarakat, Pemerintah
				Peserta tidak mengikuti pelatihan hingga tuntas	Risiko Operasional	Keterbatasan fasilitas yang diberikan kepada peserta	Jumlah peserta yang lulus pelatihan berkurang	Disperindag
				Informasi pelaksanaan pelatihan (terdiri dari jadwal, persyaratan, dan teknis pelaksanaan) tidak tersampaikan secara luas	Risiko Operasional	Sosialisasi informasi tidak optimal	Jumlah peserta yang mendaftar kurang dari jumlah kuota pelatihan	Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				instruktur pelatihan yang ditetapkan kurang kompeten	Risiko Operasional	Persyaratan standarisasi instruktur belum optimal	Kualifikasi kompetensi instruktur tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Disperindag
				Kurikulum pelatihan tidak sesuai kebutuhan industri saat ini	Risiko Operasional	Tidak melakukan updating kurikulum	Ketrampilan peserta setelah lulus pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan industri	Disperindag
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan**						
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pegawai OPD tidak tanggap dalam perubahan	Risiko Operasional	Agen perubahan OPD kurang bekerja optimal	OPD kurang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kegagalan menghindari atau mengurangi dampak keterjadian resiko	Risiko Operasional	Ketidaktepatan penentuan rencana tindak pengendalian	Dampak resiko semakin berat dan meluas	Masyarakat dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Komplain pengguna layanan	Risiko Operasional	Permohonan layanan tidak terpenuhi	Penurunan kinerja instansi	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penilaian hasil evaluasi kurang akurat	Risiko Operasional	Petugas monev kurang memahami substansi monev	Kesalahan pengambilan keputusan untuk organisasi	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Kebutuhan masyakat terkait pelayanan yang cepat dan solutif tidak terpenuhi	Risiko Operasional	Kurang optimalisasi implementasi digitalisasi pelayanan	Penurunan kinerja pelayanan OPD	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Aset tidak tecover asuransi	Risiko Operasional	Aset belum tercatat	Tidak keluar uang pertanggungan asuransi karena Kerusakan aset	Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
No	**Jenis Koteks Risiko**	**Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Risiko**	**Kategori Risiko**	**Sebab**	**Dampak**	
							Uraian	**Pihak yang Terkena**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Risiko Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PE)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	**Penurunan kinerja perdagangan**	**Risiko Strategis**	**Gejolak geopolitik international**	**Penurunan performa sector perdagangan Jawa Tengah**	**Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah**

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				internastional				
	Risiko Sasaran	Sasaran :Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan						
			PDRB Sektor Perdagangan	Penurunan daya saing sektor perdagangan	Risiko Strategis	Rendahnya daya beli masyarakat	Peningkatan kecenderungan pilihan konsumen pada barang dengan harga murah meskipun bukan produk dalam negeri dan atau barang tidak sesuai standar perlindungan konsumen	Pelaku usaha, Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
			Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman	Tidak terbitnya rekomendasi perizinan	Risiko Kepatuhan	Adanya perda pelarangan peredaran minuman beralkohol / zero minuman beralkohol di beberapa	Terdapat penjualan minuman beralkohol secara ilegal	"- Masyarakat - Pemerintah"

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)			daerah tertentu		
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor						
			Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB	Pelaku usaha tidak mengajukan ijin usaha	Risiko Strategis	1. Adanya perbedaan persyaratan perijinan usaha Minol atar wilayah 2. Biaya yang dikeluarkan untuk	Terdapat penjualan minuman beralkohol secara ilegal	masyarakat dan pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						pemenuhan persyaratan administrasi sangat besar		
	Sasaran Program	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
			Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	Eksportir memilih pengurusan ijin di luar wilayah Jawa Tengah	Risiko Operasional	Komoditas eksport tidak berasal dari Jawa Tengah	Aktifitas pelayanan IPSKA Jawa Tengah menurun, sehingga meningkatkan potensi adanya penutupan IPSKA	Pelaku usaha dan Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						
			Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal	Perbedaan pelayanan penerbitan SKA pada tiap eksportir	Risiko Fraud	Terdapat oknum yang menerima suap untuk penerbitan ijin SKA	Adanya pelanggaran SOP/etik dalam penerbitan SKA	Eksportir pengguna layanan IPSKA
	Sasaran Program	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	Komoditas yang diperdagangkan kurang diminati	Risiko Operasional	Sarana perdagangan kurang diminati	tidak terjalin konektifitas hulu dan hilir	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						
			Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang di fasilitasi	Perbedaan kebutuhan antara buyer dan Penjual yang di hadirkan	Risiko Operasional	Ketidakcermatan menentukan penjual dan pembeli	Tidak terjadi transaksi	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ekspor Barang dan Jasa	Dokumen SKA tidak di sahkan	Resiko Operasional	Pelaku usaha belum memenuhi persyaratan pengajuan dokumen sebelumnya	Penurunan potensi ekspor	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						
			Jumlah Kesepakatan Kerjasama Dagang Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Produk yang di promosikan kurang diminati buyer	Risiko Operasional	Ketidakcermatan menentukan komoditas yang di promosikan	Tidak terjadi transaksi	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Program	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
			Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	Konsumen belum memahami hak dan kewajibannya	Risiko Operasional	1. Belum semua masyarakat menjadi konsumen cerdas 2. Pelaku usaha kurang peduli atas keselamatan konsumen	Peningkatan potensi kerugian masyarakat dalam mengkonsumsi produk	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah kasus yang ditangani BPSK	Fungsi BPSK belum optimal	Risiko Operasional	Masyarakat belum tau keberadaan BPSK	Sengketa konsumen tidak tertangani	Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah Barang Beredar Yang diawasi	Tidak dilakukan penindakan bagi Pelaku usaha yang mengedarkan barang tidak sesuai standar	Risiko Fraud	terdapat oknum yang melakukan fraud untuk meloloskan barang tidak SNI, tidak berlabel dan MKG untuk dapat beredar dipasaran	konsumen mendapatkan brang yang tidak aman untuk dikonsumsi	Masyarakat selaku konsumen

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelaku usaha yang tidak kooperatif selama pengawasan	Risiko Operasional	Adanya potensi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha	1. Kesulitan melakukan pengawasan 2. Beredarnya barang-barang yang tidak memenuhi Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan (K3L)	Masyarakat, Pemerintah
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
			Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	Risiko Operasional	Adanya persaingan persaingan layanan laboratorium yang sejenis	Penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa BPSMB	UPT
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Hasil pengujian tidak akurat	Risiko Reputasi	Sarpras pengujian kurang memadai	Pelanggan memilih jasa laboratorium lain	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	Risiko Fraud	Oknum petugas memenuhi permintaan customer dengan imbalan	Layanan sertifikasi di cabut ijinnya	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	Risiko Operasional	Adanya persaingan persaingan layanan laboratorium yang sejenis	Penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa BPSMB	UPT
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Hasil pengujian tidak akurat	Risiko Reputasi	Sarpras pengujian kurang memadai	Pelanggan memilih jasa laboratorium lain	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	Risiko Fraud	Oknum petugas memenuhi permintaan customer dengan imbalan	Layanan sertifikasi di cabut ijinnya	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
			Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	Produk import menguasai pasar dalam negeri	Risiko Operasional	Produk dalam negeri kurang berdaya saing	Penurunan pasar dalam negeri untuk produk lokal	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi	Tidak dilakukan kurasi pada pelaku usaha potensial ekpor	Risiko Operasional	Tidak mendapat rekomendasi dari Kab/ Kota untuk di kurasi produknya	Pelaku usaha potensi ekspor tidak menerima fasilitasi pameran	Pemerintah, pelaku usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri						
			Jumlah Fasilitasi kemitraan	Pelaku usaha belum siap untuk bermitra	Risiko Operasional	1. Produk yang dimiliki belum mampu menjawab permintaan pasar 2. Pengelolaan Manajemen pelaku usaha	Kegagalan perluasan pasar bagi pelaku usaha perdagangan	Pelaku usaha, masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						belum siap untuk mendukung pengembangan usahanya		
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						
			Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Stand tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditawarkan	Risiko Operasional	Adanya perubahan lokasi pameran	Tidak semua produk dapat didisplay	Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Tujuan	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (INF)						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan					
	Sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya Sistem Logistik D aerah						
			Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Ketimpangan biaya logistic pada tiap daerah	Risiko Operasional	Tingginya ketimpangan pembangunan antar daerah	Peningkatan tingkat dan frekuensi terjadinya inflasi	Masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						
			Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau					

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						
			Jumlah gudang distribusi yang dilakukan pantauan stok					
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas	Penetapan penyedia paket sembako murah pada e-katalog hanya pada 1(satu) penyedia	Risiko Fraud	Pemilihan penyedia yang tidak transparan atau mengarah pada penyedia tertentu	1. Tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi 2. Memperbesar potensi keterlambatan pengiriman barang	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Tujuan	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (PE)						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian					
	Sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PDRB Sektor Perindustrian	Penurunan daya saing sektor industri	Risiko Operasional	Penurunan daya saing produk	Kualitas dan kapasitas produksi tidak sesuai dengan permintaan pasar	Pelaku usaha, masyarakat , pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	Waktu pengerjaan atau spesifikasi produk yang dihasilkan tidak sesuai	Risiko Kepatuhan	Petugas tidak melaksanakan prosedur sesuai SOP	- Kualitas hasil pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan - Hilangnya kepercayaan masyarakat atas mutu layanan BILK - Temuan mayor saat survailance ISO	Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan	terdapat perbedaan perlakuan pelayanan teknis yang diberikan oleh oknum	Risiko Fraud	terdapat pelaku usaha yang memberikan suap kepada pemberi layanan	Terdapat aduan dari pelaku usaha	Pemerintah
				sertifikasi ISO 9001 dicabut	Risiko Kepatuhan	Tidak mengajukan audit eksternal	Hilangnya kepercayaan masyarakat atas mutu layanan BILK	- Pemerintah - Masyarakat
			Jumlah pelaku usaha/ binaan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	Peserta yang hadir tidak sesuai dengan alat yang didiseminasikan	Risiko Reputasi	Tidak ada penyeleksian peserta	Informasi yang didapat tidak sesuai dengan kebutuhan	Masyarakat
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	Pengguna layanan memilih menggunakan jasa di tempat lain	Risiko Operasional	1. Munculnya pesaing usaha di sektor yang sama 2. Keterbatasan layanan BIKDK 3. Pelayanan kurang optimal	1. Perluasan pasar menjadi kurang optimal 2. Menurunnya reputasi layanan BIKDK 3. adanya aduan pengguna layanan	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Peserta inkubasi bisnis dari luar Semarang kurang berminat mengikuti pendampingan secara offline di Incubator Business Center Semarang	Risiko Operasional	Tidak tersedianya fasilitas transportasi dan akomodasi bagi peserta inkubasi bisnis	Pengembangan kompetensi SDM startup digital kurang optimal	Start Up dan Pemerintah
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan	Peserta IKM yang di fasilitasi tidak order kemasan lagi	Risiko Operasional	Lokasi IKM yang jauh dari semarang membutuhkan ongkos kirim barang kemasan yang sudah jadi	1. memperbesar potensi target PAD tidak tercapai 2. Perluasan pasar layanan BIKDK kurang optimal	IKM, Masyarakat dan Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	Industri tidak berhasil melakukan perluasan usaha	Risiko Strategis	Tidak memiliki permodalan	Pelaku industri menutup usahanya	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi	Nilai TKDN yang terbit tidak optimal	Risiko Operasional	Pemenuhan dokumen persyaratan TKDN belum lengkap atau melebihi dari batas waktu yang ditentukan	Kurangnya daya saing perusahaan/industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelaku usaha yang difasilitasi batal mengikuti pameran	Risiko Operasional	Adanya perubahan Jadwal penyelenggaraan kegiatan yang bersifat tentative dari penyelenggara	Variasi produk yang dipamerkan tidak optimal	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				Penerima hibah tidak lolos verifikasi	Risiko Operasional	Tidak memenuhi persyaratan penerima hibah	Manfaat hibah tidak dirasakan calon penerima hibah	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kurangnya minat untuk mendaftar hingga proses sertifikasi TKDN	Risiko Operasional	1. Peserta tidak atau belum memahami pentingnya sertifikasi TKDN 2. Persyarata TKDN peserta belum lengkap atau sama sekali belum dimiliki	Kurangnya daya saing perusahaan/industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				produk industri (Furniture) kurang diminati di pasar international	Risiko Operasional	Penurunan daya saing produk agro (Furniture)	Permintaan produk industri (Furniture) menurun	Pelaku Industri, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Produk IKM yang difasilitasi pameran kurang diminati oleh calon pembeli	Risiko Operasional	1. Produk industri (makanan dan minuman) Jawa Tengah belum banyak dikenal oleh masyarakat 2. Produk IKM kurang berdaya saing	1. Pemasaran produk industri (makanan dan minuman) Jawa Tengah belum maksimal 2. IKM belum berhasil memperluas pasar	Pelaku Industri, Pemerintah
				Usulan calon penerima fasilitasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Risiko Operasional	Usulan calon penerima fasilitasi belum dilakukan verifikasi awal	Penerima fasilitasi tidak tepat sasaran	Pelaku Industri, Pemerintah
				pelaku industri belum dapat memenuhi persyaratan	Risiko Operasional	keterbatasan informasi dan pengetahuan pelaku industri terhadap proses produksi yang	Penundaan atau kegagalan mendapatkan sertifikat yang mengakibatkan berkurangnya capaian indikator kegiatan	Pelaku Industri, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				sertifikasi halal		menjadi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi halal		
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	Rendahnya daya saing industri	Risiko Operasional	Pelaksanaan Sosialisasi SIINas berkolaborasi dengan Kab/Kota	Meningkatkan potensi industri menutup usahanya	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah Informasi Industri	Terdapat salah input data	Risiko Operasional	Operator tidak memahami	Informasi yang tersedia tidak akurat	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						prosedur pengisian		
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	Komplain dari pelaku usaha yang tidak difasilitasi	Risiko Fraud	Oknum petugas melakukan nepotisme	IKM yang seharusnya mendapat fasilitasi tidak mendapatkan hak nya	Masyarakat , Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah Sertifikasi Industri	IKM tidak memenuhi persyaratan sertifikasi	Risiko Operasional	Hasil Kurasi IKM yang akan difasilitasi kurang tepa	Sertifikasi industri tidak terbit	Masyarakat , Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Program	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						
			Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	Perusahaan tidak dapat melakukan perluasan usaha / investasi baru	Risiko Operasional	Perijinan dasar belum terpenuhi	Industri tidak memiliki legalitas kegiatan berusaha	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Industri dilakukan verifikasi secara berulang	Risiko Operasional	Industri belum memenuhi persyaratan dasar perijinan berusaha sektor industri	Membutuhkan waktu lebih untuk pemenuhan perijinan berusaha sektor industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
			Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Pelaku usaha industri tidak melaksanakan kewajiban pelaksanaan kegiatan usahanya	Risiko Operasional	1. Industri belum memahami pentingnya kepemilikan akun siinas 2. Pergantian admin SIINas pelaku usaha sangat cepat	Data pelaporan pada SIINas tidak akurat	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						
			Jumlah penambahan Industri dalam SIINAS	Peserta sosialisasi yang diadakan kab/kota yang hadir tidak sesuai kompetensi / bidang yang diharapkan	Risiko Operasional	Industri kurang mengetahui maksud tujuan kegiatan dimaksud	Pelaksanaan Kewajiban pada SIINas tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				Pelaku usaha tidak bersedia dilakukan pengawasan dan pendampin	Risiko Operasional	Pelaku usaha kurang memahami pentingnya menyampaikan laporan dalam SIINas	Data laporan tahap produksi pada SIINas kurang akurat	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				gan dalam pelaporan				
	Sasaran Tujuan	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (TPT)						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian					
	Sasaran Startegi	Sasaran :Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki						
			Persentase pe ningkatan jumlah tenaga kerja industri teksil dan alas kaki	Kebutuhan tenaga kerja industri alas kaki dan	Risiko Strategis	Kapasitas SDM yang tidak memenuhi standarisasi industri alas kaki dan tekstil	Pelaku industri tekstil dan alas kaki berpindah lokasi produksi ke Provinsi lain	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				tekstil tidak terpenuhi				
	Sasaran Program	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	Peserta menolak penempatan	Risiko Reputasi	Lokasi penempatan jauh dari rumah dan UMK yang tidak sesuai dengan ekspektasi peserta	1. Kredibilitas BIPTAK menurun bagi industri karena tidak dapat memenuhi kuota yang di sepakati 2. Jumlah calon tenaga kerja yang akan di salurkan ke industri berkurang	Pelaku Usaha, Pemerintah
				Perusahaan memutus kerjasama	Risiko Kemitraan	ketrampilah tenaga kerja yang dikirimkan tidak sesuai kebutuhan perusahaan	Tidak bisa lagi mengirimkan peserta pelatihan untuk bekerja di perusahaan	Masyarakat , Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peserta tidak lolos seleksi perusahaan	Risiko Operasional	Ketrampilan peserta belum memenuhi standar industri	Jumlah calon tenaga kerja yang akan di salurkan ke industri berkurang	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil	terdapat monopoli vendor	Risiko Fraud	Pemilihan vendor sudah mengarah pada penyedia tertentu	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan	Peserta Pelatihan, Pemerintah, Pelaku Usaha
				Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan kebutuhan industri	Risiko Operasional	Mesin praktek yang dimiliki sudah out off date	Kualifikasi Kompetensi peserta tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Calon peserta enggan mengikuti pelatihan	Risiko Operasional	Lokasi pelaksanaan jauh dari tempat tinggal calon peserta	Pelatihan tidak optimal	Masyarakat, Pemerintah
				Peserta tidak mengikuti pelatihan hingga tuntas	Risiko Operasional	Keterbatasan fasilitas yang diberikan kepada peserta	Jumlah peserta yang lulus pelatihan berkurang	Disperindag
				Informasi pelaksanaan pelatihan (terdiri dari jadwal, persyaratan	Risiko Operasional	Sosialisasi informasi tidak optimal	Jumlah peserta yang mendaftar kurang dari jumlah kuota pelatihan	Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				, dan teknis pelaksanaan) tidak tersampaikan secara luas				
				instruktur pelatihan yang ditetapkan kurang kompeten	Risiko Operasional	Persyaratan standarisasi instruktur belum optimal	Kualifikasi kompetensi instruktur tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Disperindag
				Kurikulum pelatihan tidak sesuai kebutuhan industri saat ini	Risiko Operasional	Tidak melakukan updating kurikulum	Ketrampilan peserta setelah lulus pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan industri	Disperindag
			Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki	terdapat monopoli vendor	Risiko Fraud	Pemilihan vendor sudah mengarah pada penyedia tertentu	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan	Peserta Pelatihan, Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan kebutuhan industri	Risiko Operasional	Mesin praktek yang dimiliki sudah out off date	Kualifikasi Kompetensi peserta tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha
				Calon peserta enggan mengikuti pelatihan	Risiko Operasional	Lokasi pelaksanaan jauh dari tempat tinggal calon peserta	Pelatihan tidak optimal	Masyarakat, Pemerintah
				Peserta tidak mengikuti pelatihan hingga tuntas	Risiko Operasional	Keterbatasan fasilitas yang diberikan kepada peserta	Jumlah peserta yang lulus pelatihan berkurang	Disperindag

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Informasi pelaksanaan pelatihan (terdiri dari jadwal, persyaratan, dan teknis pelaksanaan) tidak tersampaikan secara luas	Risiko Operasional	Sosialisasi informasi tidak optimal	Jumlah peserta yang mendaftar kurang dari jumlah kuota pelatihan	Pemerintah, Pelaku Usaha
				instruktur pelatihan yang ditetapkan kurang kompeten	Risiko Operasional	Persyaratan standarisasi instruktur belum optimal	Kualifikasi kompetensi instruktur tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Disperindag
				Kurikulum pelatihan tidak sesuai kebutuhan industri saat ini	Risiko Operasional	Tidak melakukan updating kurikulum	Ketrampilan peserta setelah lulus pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan industri	Disperindag

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Tujuan	Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pegawai OPD tidak tanggap dalam perubahan	Risiko Operasional	Agen perubahan OPD kurang bekerja optimal	OPD kurang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah
	sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kegagalan menghindari atau mengurangi dampak keterjadian resiko	Risiko Operasional	Ketidaktepatan penentuan rencana tindak pengendalian	Dampak resiko semakin berat dan meluas	Masyarakat dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Komplain pengguna layanan	Risiko Operasional	Permohonan layanan tidak terpenuhi	Penurunan kinerja instansi	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penilaian hasil evaluasi kurang akurat	Risiko Operasional	Petugas monev kurang memahami substansi monev	Kesalahan pengambilan keputusan untuk organisasi	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Kebutuhan masyakat terkait pelayanan yang cepat dan solutif tidak terpenuhi	Risiko Operasional	Kurang optimalisasi implementasi digitalisasi pelayanan	Penurunan kinerja pelayanan OPD	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sesuai dengan standar layanan					
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Aset tidak tecover asuransi	Risiko Operasional	Aset belum tercatat	Tidak keluar uang pertanggungan asuransi karena Kerusakan aset	Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			daerah yang sesuai standar layanan					
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pemerintah daerah yang disediakan			vendor tertentu		
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kemasan Kelas A (BIKDK)					
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			vendor tertentu		

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Risiko Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PE)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Penurunan kinerja perdagangan internastional	Risiko Strategis	Gejolak geopolitik international	Penurunan performa sector perdagangan Jawa Tengah	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah
	Risiko Sasaran	Sasaran :Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan						

			PDRB Sektor Perdagangan	Penurunan daya saing sektor perdagangan	Risiko Strategis	Rendahnya daya beli masyarakat	Peningkatan kecenderungan pilihan konsumen pada barang dengan harga murah meskipun bukan produk dalam negeri dan atau barang tidak sesuai standar perlindungan konsumen	Pelaku usaha, Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
			Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	Tidak terbitnya rekomendasi perizinan	Risiko Kepatuhan	Adanya perda pelarangan peredaran minuman beralkohol / zero minuman beralkohol di beberapa daerah tertentu	Terdapat penjualan minuman beralkohol secara ilegal	"- Masyarakat - Pemerintah"

	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor						
			Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB	Pelaku usaha tidak mengajukan ijin usaha	Risiko Strategis	1. Adanya perbedaan persyaratan perijinan usaha Minol atar wilayah 2. Blaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan persyaratan administrasi sangat besar	Terdapat penjualan minuman beralkohol secara ilegal	masyarakat dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						

			Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	Eksportir memilih pengurusan ijin di luar wilayah Jawa Tengah	Risiko Operasional	Komoditas eksport tidak berasal dari Jawa Tengah	Aktifitas pelayanan IPSKA Jawa Tengah menurun, sehingga meningkatkan potensi adanya penutupan IPSKA	Pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						
			Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal	Perbedaan pelayanan penerbitan SKA pada tiap eksportir	Risiko Fraud	Terdapat oknum yang menerima suap untuk penerbitan ijin SKA	Adanya pelanggaran SOP/etik dalam penerbitan SKA	Eksportir pengguna layanan IPSKA
	Sasaran Program	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						

			Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	Komoditas yang diperdagangkan kurang diminati	Risiko Operasional	Sarana perdagangan kurang diminati	tidak terjalin konektifitas hulu dan hilir	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						
			Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang di fasilitasi	Perbedaan kebutuhan antara buyer dan Penjual yang di hadirkan	Risiko Operasional	Ketidakcermatan menentukan penjual dan pembeli	Tidak terjadi transaksi	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
			Ekspor Barang dan Jasa	Dokumen SKA tidak di sahkan	Resiko Operasional	Pelaku usaha belum memenuhi persyaratan pengajuan dokumen sebelumnya	Penurunan potensi ekspor	Pelaku usaha, Pemerintah

	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						
			Jumlah Kesepakatan Kerjasama Dagang Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Produk yang di promosikan kurang diminati buyer	Risiko Operasional	Ketidakcermatan menentukan komoditas yang di promosikan	Tidak terjadi transaksi	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						

			Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	Konsumen belum memahami hak dan kewajibannya	Risiko Operasional	1. Belum semua masyarakat menjadi konsumen cerdas 2. Pelaku usaha kurang peduli atas keselamatan konsumen	Peningkatan potensi kerugian masyarakat dalam mengkonsumsi produk	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah kasus yang ditangani BPSK	Fungsi BPSK belum optimal	Risiko Operasional	Masyarakat belum tau keberadaan BPSK	Sengketa konsumen tidak tertangani	Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						

			Jumlah Barang Beredar Yang diawasi	Tidak dilakukan penindakan bagi Pelaku usaha yang mengedarkan barang tidak sesuai standar	Risiko Fraud	terdapat oknum yang melakukan fraud untuk meloloskan barang tidak SNI, tidak berlabel dan MKG untuk dapat beredar dipasaran	konsumen mendapatkan brang yang tidak aman untuk dikonsumsi	Masyarakat selaku konsumen
				Pelaku usaha yang tidak kooperatif selama pengawasan	Risiko Operasional	Adanya potensi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha	1. Kesulitan melakukan pengawasan 2. Beredarnya barang-barang yang tidak memenuhi Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan (K3L)	Masyarakat, Pemerintah
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						

			Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	Risiko Operasional	Adanya persaingan persaingan layanan laboratorium yang sejenis	Penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa BPSMB	UPT
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Hasil pengujian tidak akurat	Risiko Reputasi	Sarpras pengujian kurang memadai	Pelanggan memilih jasa laboratorium lain	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	Risiko Fraud	Oknum petugas memenuhi permintaan customer dengan imbalan	Layanan sertifikasi di cabut ijinnya	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						

			Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	Risiko Operasional	Adanya persaingan persaingan layanan laboratorium yang sejenis	Penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa BPSMB	UPT
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Hasil pengujian tidak akurat	Risiko Reputasi	Sarpras pengujian kurang memadai	Pelanggan memilih jasa laboratorium lain	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	Risiko Fraud	Oknum petugas memenuhi permintaan customer dengan imbalan	Layanan sertifikasi di cabut ijinnya	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						

			Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	Produk import menguasai pasar dalam negeri	Risiko Operasional	Produk dalam negeri kurang berdaya saing	Penurunan pasar dalam negeri untuk produk lokal	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri						
			Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi	Tidak dilakukan kurasi pada pelaku usaha potensial ekpor	Risiko Operasional	Tidak mendapat rekomendasi dari Kab/ Kota untuk di kurasi produknya	Pelaku usaha potensi ekspor tidak menerima fasilitasi pameran	Pemerintah, pelaku usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri						
			Jumlah Fasilitasi kemitraan	Pelaku usaha belum siap untuk bermitra	Risiko Operasional	1. Produk yang dimiliki belum mampu menjawab permintaan pasar 2. Pengelolaan Manajemen pelaku usaha belum siap untuk	Kegagalan perluasan pasar bagi pelaku usaha perdagangan	Pelaku usaha, masyarakat, Pemerintah

						mendukung pengembangan usahanya		
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						
			Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Stand tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditawarkan	Risiko Operasional	Adanya perubahan lokasi pameran	Tidak semua produk dapat didisplay	Pemerintah, Pelaku Usaha
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (INF)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan					

	Sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya Sistem Logistik D aerah						
			Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Ketimpangan biaya logistic pada tiap daerah	Risiko Operasional	Tingginya ketimpangan pembangunan antar daerah	Peningkatan tingkat dan frekuensi terjadinya inflasi	Masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						
			Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau					
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						
			Jumlah gudang distribusi yang dilakukan pantauan stok					

	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						
			Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas	Penetapan penyedia paket sembako murah pada e-katalog hanya pada 1(satu) penyedia	Risiko Fraud	Pemilihan penyedia yang tidak transparan atau mengarah pada penyedia tertentu	1. Tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi 2. Memperbesar potensi keterlambatan pengiriman barang	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (PE)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian					

	Sasaran Strategi	**Sasaran :Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian**						
			PDRB Sektor Perindustrian	Penurunan daya saing sektor industri	Risiko Operasional	Penurunan daya saing produk	Kualitas dan kapasitas produksi tidak sesuai dengan permintaan pasar	Pelaku usaha, masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	Waktu pengerjaan atau spesifikasi produk yang dihasilkan tidak sesuai	Risiko Kepatuhan	Petugas tidak melaksanakan prosedur sesuai SOP	- Kualitas hasil pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan - Hilangnya kepercayaan masyarakat atas mutu layanan BILK - Temuan mayor saat survailance ISO	Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						

			Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan	terdapat perbedaan perlakuan pelayanan teknis yang diberikan oleh oknum	Risiko Fraud	terdapat pelaku usaha yang memberikan suap kepada pemberi layanan	Terdapat aduan dari pelaku usaha	Pemerintah
				sertifikasi ISO 9001 dicabut	Risiko Kepatuhan	Tidak mengajukan audit eksternal	Hilangnya kepercayaan masyarakat atas mutu layanan BILK	- Pemerintah - Masyarakat
			Jumlah pelaku usaha/ binaan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	Peserta yang hadir tidak sesuai dengan alat yang didiseminasikan	Risiko Reputasi	Tidak ada penyeleksian peserta	Informasi yang didapat tidak sesuai dengan kebutuhan	Masyarakat
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	Pengguna layanan memilih menggunakan jasa di tempat lain	Risiko Operasional	1. Munculnya pesaing usaha di sektor yang sama 2. Keterbatasan layanan BIKDK 3. Pelayanan kurang optimal	1. Perluasan pasar menjadi kurang optimal 2. Menurunnya reputasi layanan BIKDK 3. adanya aduan pengguna layanan	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana						

		Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Peserta inkubasi bisnis dari luar Semarang kurang berminat mengikuti pendampingan secara offline di Incubator Business Center Semarang	Risiko Operasional	Tidak tersedianya fasilitas transportasi dan akomodasi bagi peserta inkubasi bisnis	Pengembangan kompetensi SDM startup digital kurang optimal	Start Up dan Pemerintah
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan	Peserta IKM yang di fasilitasi tidak order kemasan lagi	Risiko Operasional	Lokasi IKM yang jauh dari semarang membutuhkan ongkos kirim barang kemasan yang sudah jadi	1. memperbesar potensi target PAD tidak tercapai 2. Perluasan pasar layanan BIKDK kurang optimal	IKM, Masyarakat dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						

			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	Industri tidak berhasil melakukan perluasan usaha	Risiko Strategis	Tidak memiliki permodalan	Pelaku industri menutup usahanya	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi	Nilai TKDN yang terbit tidak optimal	Risiko Operasional	Pemenuhan dokumen persyaratan TKDN belum lengkap atau melebihi dari batas waktu yang ditentukan	Kurangnya daya saing perusahaan/industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				Pelaku usaha yang difasilitasi batal mengikuti pameran	Risiko Operasional	Adanya perubahan Jadwal penyelenggaraan kegiatan yang bersifat tentative dari penyelenggara	Variasi produk yang dipamerkan tidak optimal	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

				Penerima hibah tidak lolos verifikasi	Risiko Operasional	Tidak memenuhi persyaratan penerima hibah	Manfaat hibah tidak dirasakan calon penerima hibah	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				Kurangnya minat untuk mendaftar hingga proses sertifikasi TKDN	Risiko Operasional	1. Peserta tidak atau belum memahami pentingnya sertifikasi TKDN 2. Persyarata TKDN peserta belum lengkap atau sama sekali belum dimiliki	Kurangnya daya saing perusahaan/industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				produk industri (Furniture) kurang diminati di pasar international	Risiko Operasional	Penurunan daya saing produk agro (Furniture)	Permintaan produk industri (Furniture) menurun	Pelaku Industri, Pemerintah

				Produk IKM yang difasilitasi pameran kurang diminati oleh calon pembeli	Risiko Operasional	1. Produk industri (makanan dan minuman) Jawa Tengah belum banyak dikenal oleh masyarakat 2. Produk IKM kurang berdaya saing	1. Pemasaran produk industri (makanan dan minuman) Jawa Tengah belum maksimal 2. IKM belum berhasil memperluas pasar	Pelaku Industri, Pemerintah
				Usulan calon penerima fasilitasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Risiko Operasional	Usulan calon penerima fasilitasi belum dilakukan verifikasi awal	Penerima fasilitasi tidak tepat sasaran	Pelaku Industri, Pemerintah
				pelaku industri belum dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal	Risiko Operasional	keterbatasan informasi dan pengetahuan pelaku industri terhadap proses produksi yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi halal	Penundaan atau kegagalan mendapatkan sertifikat yang mengakibatkan berkurangnya capaian indikator kegiatan	Pelaku Industri, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						

			Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	Rendahnya daya saing industri	Risiko Operasional	Pelaksanaan Sosialisasi SIINas berkolaborasi dengan Kab/Kota	Meningkatkan potensi industri menutup usahanya	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah Informasi Industri	Terdapat salah input data	Risiko Operasional	Operator tidak memahami prosedur pengisian	Informasi yang tersedia tidak akurat	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	Komplain dari pelaku usaha yang tidak difasilitasi	Risiko Fraud	Oknum petugas melakukan nepotisme	IKM yang seharusnya mendapat fasilitasi tidak mendapatkan hak nya	Masyarakat , Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						

			Jumlah Sertifikasi Industri	IKM tidak memenuhi persyaratan sertifikasi	Risiko Operasional	Hasil Kurasi IKM yang akan difasilitasi kurang tepa	Sertifikasi industri tidak terbit	Masyarakat , Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						
			Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	Perusahaan tidak dapat melakukan perluasan usaha / investasi baru	Risiko Operasional	Perijinan dasar belum terpenuhi	Industri tidak memiliki legalitas kegiatan berusaha	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)						

		Kewenangan Provinsi						
			Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Industri dilakukan verifikasi secara berulang	Risiko Operasional	Industri belum memenuhi persyaratan dasar perijinan berusaha sektor industri	Membutuhkan waktu lebih untuk pemenuhan perijinan berusaha sektor industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
			Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Pelaku usaha industri tidak melaksanakan kewajiban pelaksanaan kegiatan usahanya	Risiko Operasional	1. Industri belum memahami pentingnya kepemilikan akun siinas 2. Pergantian admin SIINas pelaku usaha sangat cepat	Data pelaporan pada SIINas tidak akurat	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						
			Jumlah penambahan Industri dalam SIINAS	Peserta sosialisasi yang diadakan kab/kota yang hadir tidak sesuai kompetensi / bidang yang diharapkan	Risiko Operasional	Industri kurang mengetahui maksud tujuan kegiatan dimaksud	Pelaksanaan Kewajiban pada SIINas tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				Pelaku usaha tidak bersedia dilakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaporan	Risiko Operasional	Pelaku usaha kurang memahami pentingnya menyampaikan laporan dalam SIINas	Data laporan tahap produksi pada SIINas kurang akurat	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (TPT)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian					

	Sasaran Startegi	Sasaran :Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki						
			Persentase pe ningkatan jumlah tenaga kerja industri teksil dan alas kaki	Kebutuhan tenaga kerja industri alas kaki dan tekstil tidak terpenuhi	Risiko Strategis	Kapasitas SDM yang tidak memenuhi standarisasi industri alas kaki dan tekstil	Pelaku industri tekstil dan alas kaki berpindah lokasi produksi ke Provinsi lain	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha
	Sasaran Program	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	Peserta menolak penempatan	Risiko Reputasi	Lokasi penempatan jauh dari rumah dan UMK yang tidak sesuai dengan ekspektasi peserta	1. Kredibilitas BIPTAK menurun bagi industri karena tidak dapat memenuhi kuota yang di sepakati 2. Jumlah calon tenaga kerja yang akan di salurkan ke industri berkurang	Pelaku Usaha, Pemerintah
				Perusahaan memutus kerjasama	Risiko Kemitraan	ketrampilah tenaga kerja yang dikirimkan tidak sesuai kebutuhan perusahaan	Tidak bisa lagi mengirimkan peserta pelatihan untuk bekerja di perusahaan	Masyarakat , Pemerintah

				Peserta tidak lolos seleksi perusahaan	Risiko Operasional	Ketrampilan peserta belum memenuhi standar industri	Jumlah calon tenaga kerja yang akan di salurkan ke industri berkurang	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil	terdapat monopoli vendor	Risiko Fraud	Pemilihan vendor sudah mengarah pada penyedia tertentu	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan	Peserta Pelatihan, Pemerintah, Pelaku Usaha
				Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan kebutuhan industri	Risiko Operasional	Mesin praktek yang dimiliki sudah out off date	Kualifikasi Kompetensi peserta tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha

				Calon peserta enggan mengikuti pelatihan	Risiko Operasional	Lokasi pelaksanaan jauh dari tempat tinggal calon peserta	Pelatihan tidak optimal	Masyarakat, Pemerintah
				Peserta tidak mengikuti pelatihan hingga tuntas	Risiko Operasional	Keterbatasan fasilitas yang diberikan kepada peserta	Jumlah peserta yang lulus pelatihan berkurang	Disperindag
				Informasi pelaksanaan pelatihan (terdiri dari jadwal, persyaratan, dan teknis pelaksanaan) tidak tersampaikan secara luas	Risiko Operasional	Sosialisasi informasi tidak optimal	Jumlah peserta yang mendaftar kurang dari jumlah kuota pelatihan	Pemerintah, Pelaku Usaha
				instruktur pelatihan yang ditetapkan kurang kompeten	Risiko Operasional	Persyaratan standarisasi instruktur belum optimal	Kualifikasi kompetensi instruktur tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Disperindag

				Kurikulum pelatihan tidak sesuai kebutuhan industri saat ini	Risiko Operasional	Tidak melakukan updating kurikulum	Ketrampilan peserta setelah lulus pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan industri	Disperindag
			Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki	terdapat monopoli vendor	Risiko Fraud	Pemilihan vendor sudah mengarah pada penyedia tertentu	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan	Peserta Pelatihan, Pemerintah, Pelaku Usaha
				Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan kebutuhan industri	Risiko Operasional	Mesin praktek yang dimiliki sudah out off date	Kualifikasi Kompetensi peserta tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha
				Calon peserta enggan mengikuti pelatihan	Risiko Operasional	Lokasi pelaksanaan jauh dari tempat tinggal calon peserta	Pelatihan tidak optimal	Masyarakat, Pemerintah
				Peserta tidak mengikuti pelatihan hingga tuntas	Risiko Operasional	Keterbatasan fasilitas yang diberikan kepada peserta	Jumlah peserta yang lulus pelatihan berkurang	Disperindag
				Informasi pelaksanaan pelatihan (terdiri dari jadwal, persyaratan, dan teknis pelaksanaan)	Risiko Operasional	Sosialisasi informasi tidak optimal	Jumlah peserta yang mendaftar kurang dari jumlah kuota pelatihan	Pemerintah, Pelaku Usaha

				tidak tersampaikan secara luas				
				instruktur pelatihan yang ditetapkan kurang kompeten	Risiko Operasional	Persyaratan standarisasi instruktur belum optimal	Kualifikasi kompetensi instruktur tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Disperindag
				Kurikulum pelatihan tidak sesuai kebutuhan industri saat ini	Risiko Operasional	Tidak melakukan updating kurikulum	Ketrampilan peserta setelah lulus pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan industri	Disperindag
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan**						
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pegawai OPD tidak tanggap dalam perubahan	Risiko Operasional	Agen perubahan OPD kurang bekerja optimal	OPD kurang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah

	sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kegagalan menghindari atau mengurangi dampak keterjadian resiko	Risiko Operasional	Ketidaktepatan penentuan rencana tindak pengendalian	Dampak resiko semakin berat dan meluas	Masyarakat dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Komplain pengguna layanan	Risiko Operasional	Permohonan layanan tidak terpenuhi	Penurunan kinerja instansi	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi						

		Kinerja Perangkat Daerah						
			Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penilaian hasil evaluasi kurang akurat	Risiko Operasional	Petugas monev kurang memahami substansi monev	Kesalahan pengambilan keputusan untuk organisasi	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Kebutuhan masyakat terkait pelayanan yang cepat dan solutif tidak terpenuhi	Risiko Operasional	Kurang optimalisasi implementasi digitalisasi pelayanan	Penurunan kinerja pelayanan OPD	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						

			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah						

		Kewenangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-

	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-

	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Aset tidak tecover asuransi	Risiko Operasional	Aset belum tercatat	Tidak keluar uang pertanggungan asuransi karena Kerusakan aset	Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah

	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah

	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Risiko Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PE)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Penurunan kinerja perdagangan internastional	Risiko Strategis	Gejolak geopolitik international	Penurunan performa sector perdagangan Jawa Tengah	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah
	Risiko Sasaran	Sasaran :Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan						
			PDRB Sektor Perdagangan	Penurunan daya saing sektor perdagangan	Risiko Strategis	Rendahnya daya beli masyarakat	Peningkatan kecenderungan pilihan konsumen pada barang dengan harga murah meskipun bukan produk dalam negeri dan atau barang tidak sesuai standar perlindungan konsumen	Pelaku usaha, Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	Tidak terbitnya rekomendasi perizinan	Risiko Kepatuhan	Adanya perda pelarangan peredaran minuman beralkohol / zero minuman beralkohol di beberapa daerah tertentu	Terdapat penjualan minuman beralkohol secara ilegal	"- Masyarakat - Pemerintah"
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB	Pelaku usaha tidak mengajukan ijin usaha	Risiko Strategis	1. Adanya perbedaan persyaratan perijinan usaha Minol atar wilayah 2. Blaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan persyaratan administrasi sangat besar	Terdapat penjualan minuman beralkohol secara ilegal	masyarakat dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
			Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	Eksportir memilih pengurusan ijin di luar wilayah Jawa Tengah	Risiko Operasional	Komoditas eksport tidak berasal dari Jawa Tengah	Aktifitas pelayanan IPSKA Jawa Tengah menurun, sehingga meningkatkan potensi adanya penutupan IPSKA	Pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						
			Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal	Perbedaan pelayanan penerbitan SKA pada tiap eksportir	Risiko Fraud	Terdapat oknum yang menerima suap untuk penerbitan ijin SKA	Adanya pelanggaran SOP/etik dalam penerbitan SKA	Eksportir pengguna layanan IPSKA
	Sasaran Program	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
			Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	Komoditas yang diperdagangkan kurang diminati	Risiko Operasional	Sarana perdagangan kurang diminati	tidak terjalin konektifitas hulu dan hilir	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						
			Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang di fasilitasi	Perbedaan kebutuhan antara buyer dan Penjual yang di hadirkan	Risiko Operasional	Ketidakcermatan menentukan penjual dan pembeli	Tidak terjadi transaksi	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
			Ekspor Barang dan Jasa	Dokumen SKA tidak di sahkan	Resiko Operasional	Pelaku usaha belum memenuhi persyaratan pengajuan dokumen sebelumnya	Penurunan potensi ekspor	Pelaku usaha, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						
			Jumlah Kesepakatan Kerjasama Dagang Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Produk yang di promosikan kurang diminati buyer	Risiko Operasional	Ketidakcermatan menentukan komoditas yang di promosikan	Tidak terjadi transaksi	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	Konsumen belum memahami hak dan kewajibannya	Risiko Operasional	1. Belum semua masyarakat menjadi konsumen cerdas 2. Pelaku usaha kurang peduli atas keselamatan konsumen	Peningkatan potensi kerugian masyarakat dalam mengkonsumsi produk	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah kasus yang ditangani BPSK	Fungsi BPSK belum optimal	Risiko Operasional	Masyarakat belum tau keberadaan BPSK	Sengketa konsumen tidak tertangani	Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah Barang Beredar Yang diawasi	Tidak dilakukan penindakan bagi Pelaku usaha yang mengedarkan barang tidak sesuai standar	Risiko Fraud	terdapat oknum yang melakukan fraud untuk meloloskan barang tidak SNI, tidak berlabel dan MKG untuk dapat beredar dipasaran	konsumen mendapatkan brang yang tidak aman untuk dikonsumsi	Masyarakat selaku konsumen

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelaku usaha yang tidak kooperatif selama pengawasan	Risiko Operasional	Adanya potensi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha	1. Kesulitan melakukan pengawasan 2. Beredarnya barang-barang yang tidak memenuhi Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan (K3L)	Masyarakat, Pemerintah
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
			Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	Risiko Operasional	Adanya persaingan persaingan layanan laboratorium yang sejenis	Penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa BPSMB	UPT

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Hasil pengujian tidak akurat	Risiko Reputasi	Sarpras pengujian kurang memadai	Pelanggan memilih jasa laboratorium lain	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	Risiko Fraud	Oknum petugas memenuhi permintaan customer dengan imbalan	Layanan sertifikasi di cabut ijinnya	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	Risiko Operasional	Adanya persaingan persaingan layanan laboratorium yang sejenis	Penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa BPSMB	UPT
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Hasil pengujian tidak akurat	Risiko Reputasi	Sarpras pengujian kurang memadai	Pelanggan memilih jasa laboratorium lain	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	Risiko Fraud	Oknum petugas memenuhi permintaan customer dengan imbalan	Layanan sertifikasi di cabut ijinnya	Masyarakat, Pelaku usaha dan Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Program	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
			Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	Produk import menguasai pasar dalam negeri	Risiko Operasional	Produk dalam negeri kurang berdaya saing	Penurunan pasar dalam negeri untuk produk lokal	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri						
			Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi	Tidak dilakukan kurasi pada pelaku usaha potensial ekpor	Risiko Operasional	Tidak mendapat rekomendasi dari Kab/ Kota untuk di kurasi produknya	Pelaku usaha potensi ekspor tidak menerima fasilitasi pameran	Pemerintah, pelaku usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri						
			Jumlah Fasilitasi kemitraan	Pelaku usaha belum siap untuk bermitra	Risiko Operasional	1. Produk yang dimiliki belum mampu menjawab permintaan pasar 2. Pengelolaan Manajemen pelaku usaha belum siap untuk mendukung pengembangan usahanya	Kegagalan perluasan pasar bagi pelaku usaha perdagangan	Pelaku usaha, masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						
			Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Stand tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditawarkan	Risiko Operasional	Adanya perubahan lokasi pameran	Tidak semua produk dapat didisplay	Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (INF)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan					
	Sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya Sistem Logistik D aerah						
			Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Ketimpangan biaya logistic pada tiap daerah	Risiko Operasional	Tingginya ketimpangan pembangunan antar daerah	Peningkatan tingkat dan frekuensi terjadinya inflasi	Masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						
			Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau					

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						
			Jumlah gudang distribusi yang dilakukan pantauan stok					
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Informasi Perdagangan						
			Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas	Penetapan penyedia paket sembako murah pada e-katalog hanya pada 1(satu) penyedia	Risiko Fraud	Pemilihan penyedia yang tidak transparan atau mengarah pada penyedia tertentu	1. Tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi 2. Memperbesar potensi keterlambatan pengiriman barang	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (PE)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian					

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Strategi	**Sasaran :Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian**						
			PDRB Sektor Perindustrian	Penurunan daya saing sektor industri	Risiko Operasional	Penurunan daya saing produk	Kualitas dan kapasitas produksi tidak sesuai dengan permintaan pasar	Pelaku usaha, masyarakat , pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	Waktu pengerjaan atau spesifikasi produk yang dihasilkan tidak sesuai	Risiko Kepatuhan	Petugas tidak melaksanakan prosedur sesuai SOP	- Kualitas hasil pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan - Hilangnya kepercayaan masyarakat atas mutu layanan BILK - Temuan mayor saat survailance ISO	Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan	terdapat perbedaan perlakuan pelayanan teknis yang diberikan oleh oknum	Risiko Fraud	terdapat pelaku usaha yang memberikan suap kepada pemberi layanan	Terdapat aduan dari pelaku usaha	Pemerintah
				sertifikasi ISO 9001 dicabut	Risiko Kepatuhan	Tidak mengajukan audit eksternal	Hilangnya kepercayaan masyarakat atas mutu layanan BILK	- Pemerintah - Masyarakat
			Jumlah pelaku usaha/ binaan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	Peserta yang hadir tidak sesuai dengan alat yang didiseminasikan	Risiko Reputasi	Tidak ada penyeleksian peserta	Informasi yang didapat tidak sesuai dengan kebutuhan	Masyarakat
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	Pengguna layanan memilih menggunakan jasa di tempat lain	Risiko Operasional	1. Munculnya pesaing usaha di sektor yang sama 2. Keterbatasan layanan BIKDK 3. Pelayanan kurang optimal	1. Perluasan pasar menjadi kurang optimal 2. Menurunnya reputasi layanan BIKDK 3. adanya aduan pengguna layanan	Pelaku usaha, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Peserta inkubasi bisnis dari luar Semarang kurang berminat mengikuti pendampingan secara offline di Incubator Business Center Semarang	Risiko Operasional	Tidak tersedianya fasilitas transportasi dan akomodasi bagi peserta inkubasi bisnis	Pengembangan kompetensi SDM startup digital kurang optimal	Start Up dan Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan	Peserta IKM yang di fasilitasi tidak order kemasan lagi	Risiko Operasional	Lokasi IKM yang jauh dari semarang membutuhkan ongkos kirim barang kemasan yang sudah jadi	1. memperbesar potensi target PAD tidak tercapai 2. Perluasan pasar layanan BIKDK kurang optimal	IKM, Masyarakat dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	Industri tidak berhasil melakukan perluasan usaha	Risiko Strategis	Tidak memiliki permodalan	Pelaku industri menutup usahanya	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi	Nilai TKDN yang terbit tidak optimal	Risiko Operasional	Pemenuhan dokumen persyaratan TKDN belum lengkap atau melebihi dari batas	Kurangnya daya saing perusahaan/industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						waktu yang ditentukan		
				Pelaku usaha yang difasilitasi batal mengikuti pameran	Risiko Operasional	Adanya perubahan Jadwal penyelenggaraan kegiatan yang bersifat tentative dari penyelenggara	Variasi produk yang dipamerkan tidak optimal	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				Penerima hibah tidak lolos verifikasi	Risiko Operasional	Tidak memenuhi persyaratan penerima hibah	Manfaat hibah tidak dirasakan calon penerima hibah	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kurangnya minat untuk mendaftar hingga proses sertifikasi TKDN	Risiko Operasional	1. Peserta tidak atau belum memahami pentingnya sertifikasi TKDN 2. Persyarata TKDN peserta belum lengkap atau sama sekali belum dimiliki	Kurangnya daya saing perusahaan/industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
				produk industri (Furniture) kurang diminati di pasar international	Risiko Operasional	Penurunan daya saing produk agro (Furniture)	Permintaan produk industri (Furniture) menurun	Pelaku Industri, Pemerintah
				Produk IKM yang difasilitasi pameran kurang diminati oleh calon pembeli	Risiko Operasional	1. Produk industri (makanan dan minuman) Jawa Tengah belum banyak dikenal oleh masyarakat 2. Produk IKM kurang berdaya saing	1. Pemasaran produk industri (makanan dan minuman) Jawa Tengah belum maksimal 2. IKM belum berhasil memperluas pasar	Pelaku Industri, Pemerintah
				Usulan calon penerima fasilitasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Risiko Operasional	Usulan calon penerima fasilitasi belum dilakukan verifikasi awal	Penerima fasilitasi tidak tepat sasaran	Pelaku Industri, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pelaku industri belum dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal	Risiko Operasional	keterbatasan informasi dan pengetahuan pelaku industri terhadap proses produksi yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi halal	Penundaan atau kegagalan mendapatkan sertifikat yang mengakibatkan berkurangnya capaian indikator kegiatan	Pelaku Industri, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	Rendahnya daya saing industri	Risiko Operasional	Pelaksanaan Sosialisasi SIINas berkolaborasi dengan Kab/Kota	Meningkatkan potensi industri menutup usahanya	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Informasi Industri	Terdapat salah input data	Risiko Operasional	Operator tidak memahami prosedur pengisian	Informasi yang tersedia tidak akurat	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	Komplain dari pelaku usaha yang tidak difasilitasi	Risiko Fraud	Oknum petugas melakukan nepotisme	IKM yang seharusnya mendapat fasilitasi tidak mendapatkan hak nya	Masyarakat , Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah Sertifikasi Industri	IKM tidak memenuhi persyaratan sertifikasi	Risiko Operasional	Hasil Kurasi IKM yang akan difasilitasi kurang tepa	Sertifikasi industri tidak terbit	Masyarakat , Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENGENDALIAN						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IZIN USAHA INDUSTRI						
			Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	Perusahaan tidak dapat melakukan perluasan usaha / investasi baru	Risiko Operasional	Perijinan dasar belum terpenuhi	Industri tidak memiliki legalitas kegiatan berusaha	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kewenangan Provinsi						
			Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Industri dilakukan verifikasi secara berulang	Risiko Operasional	Industri belum memenuhi persyaratan dasar perijinan berusaha sektor industri	Membutuhkan waktu lebih untuk pemenuhan perijinan berusaha sektor industri	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Pelaku usaha industri tidak melaksanakan kewajiban pelaksanaan kegiatan usahanya	Risiko Operasional	1. Industri belum memahami pentingnya kepemilikan akun siinas 2. Pergantian admin SIINas pelaku usaha sangat cepat	Data pelaporan pada SIINas tidak akurat	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						
			Jumlah penambahan Industri dalam SIINAS	Peserta sosialisasi yang diadakan kab/kota yang hadir tidak sesuai kompetensi / bidang yang diharapkan	Risiko Operasional	Industri kurang mengetahui maksud tujuan kegiatan dimaksud	Pelaksanaan Kewajiban pada SIINas tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelaku usaha tidak bersedia dilakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaporan	Risiko Operasional	Pelaku usaha kurang memahami pentingnya menyampaikan laporan dalam SIINas	Data laporan tahap produksi pada SIINas kurang akurat	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (TPT)**						
			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian					
	Sasaran Startegi	Sasaran :Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki						
			Persentase pe ningkatan jumlah tenaga kerja industri teksil dan alas kaki	Kebutuhan tenaga kerja industri alas kaki dan tekstil tidak terpenuhi	Risiko Strategis	Kapasitas SDM yang tidak memenuhi standarisasi industri alas kaki dan tekstil	Pelaku industri tekstil dan alas kaki berpindah lokasi produksi ke Provinsi lain	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Program	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
			Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	Peserta menolak penempatan	Risiko Reputasi	Lokasi penempatan jauh dari rumah dan UMK yang tidak sesuai dengan ekspektasi peserta	1. Kredibilitas BIPTAK menurun bagi industri karena tidak dapat memenuhi kuota yang di sepakati 2. Jumlah calon tenaga kerja yang akan di salurkan ke industri berkurang	Pelaku Usaha, Pemerintah
				Perusahaan memutus kerjasama	Risiko Kemitraan	ketrampilah tenaga kerja yang dikirimkan tidak sesuai kebutuhan perusahaan	Tidak bisa lagi mengirimkan peserta pelatihan untuk bekerja di perusahaan	Masyarakat , Pemerintah
				Peserta tidak lolos seleksi perusahaan	Risiko Operasional	Ketrampilan peserta belum memenuhi standar industri	Jumlah calon tenaga kerja yang akan di salurkan ke industri berkurang	Pelaku usaha, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						
			Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil	terdapat monopoli vendor	Risiko Fraud	Pemilihan vendor sudah mengarah pada penyedia tertentu	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan	Peserta Pelatihan, Pemerintah, Pelaku Usaha
				Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan kebutuhan industri	Risiko Operasional	Mesin praktek yang dimiliki sudah out off date	Kualifikasi Kompetensi peserta tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Calon peserta enggan mengikuti pelatihan	Risiko Operasional	Lokasi pelaksanaan jauh dari tempat tinggal calon peserta	Pelatihan tidak optimal	Masyarakat, Pemerintah
				Peserta tidak mengikuti pelatihan hingga tuntas	Risiko Operasional	Keterbatasan fasilitas yang diberikan kepada peserta	Jumlah peserta yang lulus pelatihan berkurang	Disperindag
				Informasi pelaksanaan pelatihan (terdiri dari jadwal, persyaratan, dan teknis pelaksanaan) tidak	Risiko Operasional	Sosialisasi informasi tidak optimal	Jumlah peserta yang mendaftar kurang dari jumlah kuota pelatihan	Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				tersampaikan secara luas				
				instruktur pelatihan yang ditetapkan kurang kompeten	Risiko Operasional	Persyaratan standarisasi instruktur belum optimal	Kualifikasi kompetensi instruktur tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Disperindag
				Kurikulum pelatihan tidak sesuai kebutuhan industri saat ini	Risiko Operasional	Tidak melakukan updating kurikulum	Ketrampilan peserta setelah lulus pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan industri	Disperindag
			Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki	terdapat monopoli vendor	Risiko Fraud	Pemilihan vendor sudah mengarah pada penyedia tertentu	Barang hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan	Peserta Pelatihan, Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan kebutuhan industri	Risiko Operasional	Mesin praktek yang dimiliki sudah out off date	Kualifikasi Kompetensi peserta tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha
				Calon peserta enggan mengikuti pelatihan	Risiko Operasional	Lokasi pelaksanaan jauh dari tempat tinggal calon peserta	Pelatihan tidak optimal	Masyarakat, Pemerintah
				Peserta tidak mengikuti pelatihan hingga tuntas	Risiko Operasional	Keterbatasan fasilitas yang diberikan kepada peserta	Jumlah peserta yang lulus pelatihan berkurang	Disperindag
				Informasi pelaksanaan pelatihan (terdiri dari jadwal, persyaratan, dan teknis pelaksanaan) tidak tersampaikan secara luas	Risiko Operasional	Sosialisasi informasi tidak optimal	Jumlah peserta yang mendaftar kurang dari jumlah kuota pelatihan	Pemerintah, Pelaku Usaha

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				instruktur pelatihan yang ditetapkan kurang kompeten	Risiko Operasional	Persyaratan standarisasi instruktur belum optimal	Kualifikasi kompetensi instruktur tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan	Disperindag
				Kurikulum pelatihan tidak sesuai kebutuhan industri saat ini	Risiko Operasional	Tidak melakukan updating kurikulum	Ketrampilan peserta setelah lulus pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan industri	Disperindag
	Sasaran Tujuan	**Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan**						
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pegawai OPD tidak tanggap dalam perubahan	Risiko Operasional	Agen perubahan OPD kurang bekerja optimal	OPD kurang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kegagalan menghindari atau mengurangi dampak keterjadian resiko	Risiko Operasional	Ketidaktepatan penentuan rencana tindak pengendalian	Dampak resiko semakin berat dan meluas	Masyarakat dan Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Komplain pengguna layanan	Risiko Operasional	Permohonan layanan tidak terpenuhi	Penurunan kinerja instansi	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penilaian hasil evaluasi kurang akurat	Risiko Operasional	Petugas monev kurang memahami substansi monev	Kesalahan pengambilan keputusan untuk organisasi	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Strategi	Sasaran :Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Kebutuhan masyakat terkait pelayanan yang cepat dan solutif tidak terpenuhi	Risiko Operasional	Kurang optimalisasi implementasi digitalisasi pelayanan	Penurunan kinerja pelayanan OPD	Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kepegawaian Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Aset tidak tecover asuransi	Risiko Operasional	Aset belum tercatat	Tidak keluar uang pertanggungan asuransi karena Kerusakan aset	Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						

B. Analisis Risiko

Tabel
Analisis Risiko

No	Jenis Koteks Risiko	Tujuan/ Sasaran Strategi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemerintah Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran	Masyarakat, Pemerintah
	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penunjukan vendor tertentu	Risiko Fraud	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan	Masyarakat, Pemerintah

No	Risiko	SKALA/ NILAI RISIKO YANG MELEKAT	PENGENDALIAN YANG ADA	SKALA/ NILAI RISIKO RESIDU SETELAH ADANYA PENGENDALIAN

		SKALA PROBABILITAS	SKALA DAMPAK	LEVEL RISIKO	ADA/ BELUM ADA	URAIAN	MEMADAI/ BELUM MEMADAI	SKALA PROBABILITAS	SKALA DAMPAK	LEVEL RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penurunan kinerja perdagangan internastional	4	4	16	ADA	Promosi Produk Unggulan Jawa Tengah	MEMADAI	3	4	12
	Penurunan daya saing sektor perdagangan	4	4	16	ADA	Peningkatan konektivitas hulu dan hilir	MEMADAI	3	4	12
	Tidak terbitnya rekomendasi perizinan	4	5	20	Ada	Mengadakan kegiatan Diseminasi terkait kebijakan/aturan yang berlaku tentang peredaran minuman beralkohol	Memadai	3	4	12
	Pelaku usaha tidak mengajukan ijin usaha	4	5	20	Ada	Melakukan monitoring peredaran minuman beralkohol pada pelaku usaha penjualan minuman beralkohol di daerah tertentu	Memadai	3	4	12

	Eksportir memilih pengurusan ijin di luar wilayah Jawa Tengah	2	4	8	Ada	Sosialisasi layanan IPSKA Jawa Tengah kepada pelaku usaha ekspor	Memadai	1	4	4
	Perbedaan pelayanan penerbitan SKA pada tiap eksportir	3	5	15	Ada	Monitoring berkala terhadap setiap history log activity petugas verifikator SKA untuk melihat tingkat kepatuhan SOP pelayanan penerbitan SKA	Memadai	2	3	6
	Komoditas yang diperdagangkan kurang diminati	4	3	12	ADA	Koordinasi dengan Kab/Kota dan pelaku usaha untuk mengetahui peluang pasar komoditas	MEMADAI	2	3	6
	Perbedaan kebutuhan antara buyer dan Penjual yang di hadirkan	3	3	9	ADA	Koordinasi dengan Kab/Kota dan pelaku usaha untuk mengetahui buyer dan penjual prospektif	MEMADAI	2	3	6
	Dokumen SKA tidak di sahkan	3	4	12	ADA	Pelaksanaan monitoring post audit	Memadai	2	3	6

	Produk yang di promosikan kurang diminati buyer	3	4	12	ADA	Kurasi produk yang akan di promosikan	MEMADAI	3	3	9
	Konsumen belum memahami hak dan kewajibannya	4	3	12	Ada	1. Melakukan edukasi konsumen cerdas melalui berbagai platform media 2. Melakukan pengawasan barang beredar 3. Memberikan fasilitasi standarisasi industri	Belum Memadai	3	3	9
	Fungsi BPSK belum optimal	4	3	12	Ada	Sosialisasi keberadaan BPSK	Memadai	3	3	9

	Tidak dilakukan penindakan bagi Pelaku usaha yang mengedarkan barang tidak sesuai standar	3	5	15	Ada	1. Ketika pengawasan melibatkan pihak diluar pemilik risiko 2. Pengawasan berjenjang 3. Menugaskan personil yang berbeda beda untuk lokasi tujuan pengawasan yang sama 4. Dilakukan penindakan bagi pelaku usaha yang mengedarkan barang tidak sesuai standar yang berlaku	Memadai	2	4	8
	Pelaku usaha yang tidak kooperatif selama pengawasan	3	4	12	Ada	Melakukan pengawasan bersama dengan Dinas Perdagangan di Kab/Kota	Memadai	2	3	6
	Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	5	2	10	Ada	"- Penambahan layanan ruang lingkup laboratorium - promosi layanan BPSMB kepada pelanggan (lembaga Pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha) "	Belum Memadai	5	2	10

	Hasil pengujian tidak akurat	4	4	12	ADA	Pemeliharaan sarana prasarana pengujian	Memadai	3	4	12
	Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	4	5	20	ADA	Sosialisasi anti korupsi	Memadai	2	5	10
	Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	5	2	10	Ada	"- Penambahan layanan ruang lingkup laboratorium - promosi layanan BPSMB kepada pelanggan (lembaga Pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha) "	Belum Memadai	5	2	10
	Hasil pengujian tidak akurat	4	4	12	ADA	Pemeliharaan sarana prasarana pengujian	Memadai	3	4	12
	Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	4	5	20	ADA	Sosialisasi anti korupsi	Memadai	2	5	10

	Produk import menguasai pasar dalam negeri	4	4	16	Ada	Fasilitasi pameran untuk produk dalam negeri	Memadai	3	4	12
	Tidak dilakukan kurasi pada pelaku usaha potensial ekpor	3	4	12	Ada	1. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kab/Kota secara lebih intensif 2. Kurasi dilakukan tidak hanya atas dasar rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kab/Kota	Belum Memadai	2	4	8
	Pelaku usaha belum siap untuk bermitra	4	4	16	Ada	Workshop pelaku usaha perdagangan (kurikulum e commerce, manajemen usaha)	Memadai	3	4	12
	Stand tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditawarkan	3	3	9	Ada	Koordinasi secara intensive dengan pelaksana pameran	Memadai	2	3	6

	Ketimpangan biaya logistic pada tiap daerah	5	4	20	ADA	Kerjasama perdagangan antar daerah	MEMADAI	4	4	16
	Penetapan penyedia paket sembako murah pada e-katalog hanya pada 1(satu) penyedia	3	5	15	Ada	Melakukan seleksi terhadap barang yang ditawarkan penyedia di e Katalog	Memadai	2	5	10
	Penurunan daya saing sektor industri	4	4	16	ADA	Peningkatan kapasitas SDM industry terkait inovasi tecnologi dan produk, Perluasan pasar produk unggulan hasil industry Jawa Tengah	Memadai	3	4	12
	Waktu pengerjaan atau spesifikasi produk yang dihasilkan tidak sesuai	4	5	20	Ada	Menunjuk beberapa petugas sebagai auditor internal sesuai dokumen ISO 9001 yang telah diterapkan	Memadai	2	5	10
	terdapat perbedaan perlakuan pelayanan teknis yang	2	5	10	Ada	Pengawasan SOP dan melakukan audit manajemen pelayanan	Memadai	1	4	4

	diberikan oleh oknum									
	sertifikasi ISO 9001 dicabut	4	5	20	Ada	Mengusulkan anggaran kegiatan survilance ISO	Memadai	1	3	3
	Peserta yang hadir tidak sesuai dengan alat yang didiseminasikan	3	5	15	Ada	Data peserta sudah diseleksi 3 hari sebelum pelaksanaan	Memadai	2	5	10
	Pengguna layanan memilih menggunakan jasa di tempat lain	5	3	15	Ada	1. Penyusunan SOP layanan 2. Evaluasi layanan secara berkala	Memadai	4	3	12
	Peserta inkubasi bisnis dari luar Semarang kurang berminat mengikuti pendampingan secara offline di Incubator Business Center Semarang	4	4	16	Ada	1. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan dan menentukan kriteria peserta kegiatan 2. Melakukan pendampingan ke lokasi startup peserta inkubasi	Memadai	3	4	12

	Peserta IKM yang di fasilitasi tidak order kemasan lagi	5	3	15	Ada	melakukan koordinasi dengan ekspedisi	Memadai	3	4	12
	Industri tidak berhasil melakukan perluasan usaha	3	4	12	Ada	Pengawasan industri Pelayanan perijinan	Memadai	2	3	6
	Nilai TKDN yang terbit tidak optimal	4	3	12	Ada	Melakukan verifikasi dan validasi dokumen di awal pendaftaran	Belum Memadai	4	3	12
	Pelaku usaha yang difasilitasi batal mengikuti pameran	3	3	9	Ada	Adanya cadangan pelaku usaha yang akan difasilitasi pameran	Memadai	2	2	4

	Penerima hibah tidak lolos verifikasi	4	3	12	Ada	Melakukan koordinasi, verifikasi dan validasi penerima hibah serta pergantian penerima lain dengan kelengkapan dokumen persyaratan jika penerima sebelumnya tidak sanggup memenuhi atau melebihi batas yang ditentukan	Memadai	3	3	9
	Kurangnya minat untuk mendaftar hingga proses sertifikasi TKDN	4	3	12	Ada	Melakukan verifikasi usulan calon peserta disesuaikan dengan syarat yang ditetapkan	Belum Memadai	4	3	12
	produk industri (Furniture) kurang diminati di pasar international	2	5	10	Ada	melakukan fasilitasi promosi melalui partisipasi pameran bertaraf internasional	Memadai	2	3	6
	Produk IKM yang difasilitasi pameran kurang diminati oleh calon pembeli	4	4	16	Ada	melakukan fasilitasi promosi melalui partisipasi pameran bertaraf regional dan nasional	Memadai	3	4	12

	Usulan calon penerima fasilitasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	3	9	Ada	1. Desk usulan calon penerima fasilitasi 2. Verifikasi sektoral dan pendampingan pasca verifikasi	Memadai	2	2	4
	pelaku industri belum dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal	3	4	12	Ada	Sosialisasi panduan standar proses produksi yang harus diikuti untuk memenuhi standar halal	Memadai	2	3	6
	Rendahnya daya saing industri	3	4	12	Ada	1. Peningkatan kapasitas SDM industri 2. Fasilitasi Kemitraan, Sertifikasi industri, promosi	Memadai	2	4	8
	Terdapat salah input data	3	3	9	Ada	Pendampingan penggunaan SIINas	Memadai	2	3	6
	Komplain dari pelaku usaha yang tidak difasilitasi	2	5	15	Ada	Sosialisasi antikorupsi	Memadai	1	5	5
	IKM tidak memenuhi persyaratan sertifikasi	3	3	6	ada	Sosialiasasi persyaratan sertifikasi industri	Memadai	2	2	4

	Perusahaan tidak dapat melakukan perluasan usaha / investasi baru	3	3	9	Ada	1. Melakukan koordinasi dengan OPD sektor terkait untuk pemenuhan persyaratan dasar kegiatan usaha 2. Menyediakan layanan pendampingan melalui sistem layanan, WA Hotline, zoom, dan tatap muka	Memadai	2	3	6
	Industri dilakukan verifikasi secara berulang	3	3	9	Ada	1. Screening awal sebelum pelaksanaan Rekomtek 2. Koordinasi untuk mengadakan Fasilitasi pendampingan dengan OPD Terkait kendala yang dihadapi Industri	Memadai	2	2	4
	Pelaku usaha industri tidak melaksanakan kewajiban pelaksanaan	3	4	12	Ada	Menyediakan layanan pendampingan melalui sistem layanan, WA Hotline, zoom, dan tatap muka	Memadai	2	4	8

	kegiatan usahanya									
	Peserta sosialisasi yang diadakan kab/kota yang hadir tidak sesuai kompetensi / bidang yang diharapkan	3	2	6	Ada	Koordinasi dengan Kab/Kota mengenai kriteria peserta dari wakil perusahaan/industri	Memadai	2	2	4
	Pelaku usaha tidak bersedia dilakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaporan	3	4	12	Ada	Pendampingan dan edukasi kepada perusahaan tentang pelaporan SIINas melalui wa hotline.	Memadai	2	3	6
	Kebutuhan tenaga kerja industri alas kaki dan tekstil tidak terpenuhi	5	4	20	ADA	Kerjasama dengan sekolah vokasi dalam rekruitmen calon tenaga kerja industri	MEMADAI	4	4	16

	Peserta menolak penempatan	3	3	9	Ada	1. Memberikan motivasi kepada peserta terkait mentalitas siap bekerja 2. Sosialisasi ketika rekruitmen peserta	Memadai	2	3	6
	Perusahaan memutus kerjasama	3	4	12	Ada	- Meningkatkan koordinasi dengan perusahaan - Menyusun kurikulum pelatihan bersama perusahaan	Memadai	3	3	9
	Peserta tidak lolos seleksi perusahaan	3	5	15	Ada	Kelas pelatihan disesuaikan dengan standart industri dan diadakan uji kompetensi	Memadai	3	4	12
	terdapat monopoli vendor	3	5	15	Ada	"1. Mengutamakan belanja E-Purchasing dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 2. Persetujuan dan pengawasan berjenjang"	Memadai	2	4	8
	Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan	4	4	16	Ada	Rutin berkomunikasi dengan stake holder (perusahaan) terkait peralatan praktek yang up to date	Memadai	3	4	12

	kebutuhan industri									
	Calon peserta enggan mengikuti pelatihan	3	3	9	Ada	1. Sosialisasi pelatihan BIPTAK di banyak lokasi (SMK/A, Job fair, Perusahaan, dll) 2. Membuka pendaftaran pelatihan jauh hari sebelum pelaksanaan sehingga jumlah calon pendaftar lebih banyak dari kuota pelatihan	Memadai	3	2	6
	Peserta tidak mengikuti pelatihan hingga tuntas	3	3	9	Ada	Perbaikan sarpras BIPTAK	Memadai	3	2	6
	Informasi pelaksanaan pelatihan (terdiri dari jadwal, persyaratan, dan teknis pelaksanaan) tidak	2	3	6	Ada	Pembuatan Profil BIPTAK, Brosur, Poster	Memadai	2	2	4

	tersampaikan secara luas									
	instruktur pelatihan yang ditetapkan kurang kompeten	2	3	6	Ada	Rutin berkomunikasi dengan stake holder (perusahaan) terkait kompetensi instruktur yang dibutuhkan dunia industri	Memadai	2	2	4
	Kurikulum pelatihan tidak sesuai kebutuhan industri saat ini	2	2	4	Ada	1. Melibatkan industri dalam penyusunan kurikulum 2. Evaluasi dan penyusunan Kurikulum baru setiap tahunnya	Memadai	1	2	2
	terdapat monopoli vendor	3	5	15	Ada	"1. Mengutamakan belanja E-Purchasing dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 2. Persetujuan dan pengawasan berjenjang"	Memadai	2	4	8
	Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan	4	4	16	Ada	Rutin berkomunikasi dengan stake holder (perusahaan) terkait peralatan praktek yang up to date	Memadai	3	4	12

	kebutuhan industri									
	Calon peserta enggan mengikuti pelatihan	3	3	9	Ada	1. Sosialisasi pelatihan BIPTAK di banyak lokasi (SMK/A, Job fair, Perusahaan, dll) 2. Membuka pendaftaran pelatihan jauh hari sebelum pelaksanaan sehingga jumlah calon pendaftar lebih banyak dari kuota pelatihan	Memadai	3	2	6
	Peserta tidak mengikuti pelatihan hingga tuntas	3	3	9	Ada	Perbaikan sarpras BIPTAK	Memadai	3	2	6
	Informasi pelaksanaan pelatihan (terdiri dari jadwal, persyaratan, dan teknis pelaksanaan) tidak tersampaikan secara luas	2	3	6	Ada	Pembuatan Profil BIPTAK, Brosur, Poster	Memadai	2	2	4

	instruktur pelatihan yang ditetapkan kurang kompeten	2	3	6	Ada	Rutin berkomunikasi dengan stake holder (perusahaan) terkait kompetensi instruktur yang dibutuhkan dunia industri	Memadai	2	2	4
	Kurikulum pelatihan tidak sesuai kebutuhan industri saat ini	2	2	4	Ada	1. Melibatkan industri dalam penyusunan kurikulum 2. Evaluasi dan penyusunan Kurikulum baru setiap tahunnya	Memadai	1	2	2
	Pegawai OPD tidak tanggap dalam perubahan	4	4	16	ADA	Pembaharuan Penugasan tim agen perubahan	MEMADAI	3	4	12
	Kegagalan menghindari atau mengurangi dampak keterjadian resiko	4	3	12	ADA	- Identifikasi dan mitigasi resiko mulai dari akar masalah penyebab risiko - Peningkatan kapasitas SDM terkait MR sehingga tepat dalam menentukan risiko dan RTP nya - Melakukan evaluasi manajemen	MEMADAI	3	3	9
	Komplain pengguna layanan	3	3	9	ADA	Digitalisasi untuk penyampaian kebutuhan layanan sehingga progres layanan terpantau	Memadai	2	3	6

	Penilaian hasil evaluasi kurang akurat	3	3	9	ADA	Petugas diikutkan diklat peningkatan kapasitas aparatur sesuai tusinya	Memadai	2	3	6
	Kebutuhan masyakat terkait pelayanan yang cepat dan solutif tidak terpenuhi	4	4	16	ADA	Peningkatan kapasitas SDM aparatur	MEMADAI	3	4	12
	Penunjukan vendor tertentu	3	5	15	ADA	Pengawasan berjenjang dalam pengambilan keputusan penentuan vendor	Memadai	2	5	10
	Penunjukan vendor tertentu	3	5	15	ADA	Pengawasan berjenjang dalam pengambilan keputusan penentuan vendor	Memadai	2	5	10
	Aset tidak tecover asuransi	2	4	8	Ada	Identifikasi aset secara berkala	Memadai	-	-	-
	Penunjukan vendor tertentu	3	5	15	ADA	Pengawasan berjenjang dalam pengambilan keputusan penentuan vendor	Memadai	2	5	10

	Penunjukan vendor tertentu	3	5	15	ADA	Pengawasan berjenjang dalam pengambilan keputusan penentuan vendor	Memadai	2	5	10
	Penunjukan vendor tertentu	3	5	15	ADA	Pengawasan berjenjang dalam pengambilan keputusan penentuan vendor	Memadai	2	5	10
	Penunjukan vendor tertentu	3	5	15	ADA	Pengawasan berjenjang dalam pengambilan keputusan penentuan vendor	Memadai	2	5	10
	Penunjukan vendor tertentu	3	5	15	ADA	Pengawasan berjenjang dalam pengambilan keputusan penentuan vendor	Memadai	2	5	10
	Penunjukan vendor tertentu	3	5	15	ADA	Pengawasan berjenjang dalam pengambilan keputusan penentuan vendor	Memadai	2	5	10
	Penunjukan vendor tertentu	3	5	15	ADA	Pengawasan berjenjang dalam pengambilan keputusan penentuan vendor	Memadai	2	5	10
	Penunjukan vendor tertentu	3	5	15	ADA	Pengawasan berjenjang dalam pengambilan keputusan penentuan vendor	Memadai	2	5	10

	Penunjukan vendor tertentu	3	5	15	ADA	Pengawasan berjenjang dalam pengambilan keputusan penentuan vendor	Memadai	2	5	10
	Penunjukan vendor tertentu	3	5	15	ADA	Pengawasan berjenjang dalam pengambilan keputusan penentuan vendor	Memadai	2	5	10
	Penunjukan vendor tertentu	3	5	15	ADA	Pengawasan berjenjang dalam pengambilan keputusan penentuan vendor	Memadai	2	5	10

C. Penetapan Risiko Prioritas

Tabel

Risiko Prioritas

C. Penetapan Risiko Prioritas

Tabel
Risiko Prioritas

Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	**4**	**5**
Penurunan kinerja perdagangan internastional	12		Gejolak geopolitik international	Penurunan performa sector perdagangan Jawa Tengah
Penurunan daya saing sektor perdagangan	12	Kepala Disperindag Prov Jateng	Rendahnya daya beli masyarakat	Peningkatan kecenderungan pilihan konsumen pada barang dengan harga murah meskipun bukan produk dalam negeri dan atau barang tidak sesuai standar perlindungan konsumen
Tidak terbitnya rekomendasi perizinan	12	Kabid PDN	Adanya perda pelarangan peredaran minuman beralkohol / zero minuman beralkohol di beberapa daerah tertentu	Terdapat penjualan minuman beralkohol secara ilegal

Pelaku usaha tidak mengajukan ijin usaha	12	Kepala bidang PDN	1. Adanya perbedaan persyaratan perijinan usaha Minol atar wilayah 2. BIaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan persyaratan administrasi sangat besar	Terdapat penjualan minuman beralkohol secara ilegal
Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	10	Kepala Balai	Adanya persaingan persaingan layanan laboratorium yang sejenis	Penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa BPSMB
Hasil pengujian tidak akurat	12		Sarpras pengujian kurang memadai	Pelanggan memilih jasa laboratorium lain
Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	10		Oknum petugas memenuhi permintaan customer dengan imbalan	Layanan sertifikasi di cabut ijinnya
Pelanggan tidak memilih menggunakan jasa layanan	10	Kepala Balai	Adanya persaingan persaingan layanan laboratorium yang sejenis	Penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa BPSMB
Hasil pengujian tidak akurat	12		Sarpras pengujian kurang memadai	Pelanggan memilih jasa laboratorium lain
Penilaian sertifikasi tidak sesuai standarisasi	10		Oknum petugas memenuhi permintaan customer dengan imbalan	Layanan sertifikasi di cabut ijinnya

Produk import menguasai pasar dalam negeri	12	Kabid Industri	Produk dalam negeri kurang berdaya saing	Penurunan pasar dalam negeri untuk produk lokal
Pelaku usaha belum siap untuk bermitra	12	Kepala Bidang Agro	1. Produk yang dimiliki belum mampu menjawab permintaan pasar 2. Pengelolaan Manajemen pelaku usaha belum siap untuk mendukung pengembangan usahanya	Kegagalan perluasan pasar bagi pelaku usaha perdagangan
Ketimpangan biaya logistic pada tiap daerah	16	Kepala Disperindag Prov Jateng	Tingginya ketimpangan pembangunan antar daerah	Peningkatan tingkat dan frekuensi terjadinya inflasi
Penetapan penyedia paket sembako murah pada e-katalog hanya pada 1(satu) penyedia	10		Pemilihan penyedia yang tidak transparan atau mengarah pada penyedia tertentu	1. Tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi 2. Memperbesar potensi keterlambatan pengiriman barang
Penurunan daya saing sektor industri	12	Kepala Disperindag Prov Jateng	Penurunan daya saing produk	Kualitas dan kapasitas produksi tidak sesuai dengan permintaan pasar

Waktu pengerjaan atau spesifikasi produk yang dihasilkan tidak sesuai	10	BILK	Petugas tidak melaksanakan prosedur sesuai SOP	- Kualitas hasil pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan - Hilangnya kepercayaan masyarakat atas mutu layanan BILK - Temuan mayor saat survailance ISO
Peserta yang hadir tidak sesuai dengan alat yang didiseminasikan	10	BILK	Tidak ada penyeleksian peserta	Informasi yang didapat tidak sesuai dengan kebutuhan
Pengguna layanan memilih menggunakan jasa di tempat lain	12	Kepala BIKDK	1. Munculnya pesaing usaha di sektor yang sama 2. Keterbatasan layanan BIKDK 3. Pelayanan kurang optimal	1. Perluasan pasar menjadi kurang optimal 2. Menurunnya reputasi layanan BIKDK 3. adanya aduan pengguna layanan
Peserta inkubasi bisnis dari luar Semarang kurang berminat mengikuti pendampingan secara offline di Incubator Business Center Semarang	12	Kepala BIKDK	Tidak tersedianya fasilitas transportasi dan akomodasi bagi peserta inkubasi bisnis	Pengembangan kompetensi SDM startup digital kurang optimal
Peserta IKM yang di fasilitasi tidak order kemasan lagi	12	Kepala BIKDK	Lokasi IKM yang jauh dari semarang membutuhkan ongkos kirim barang kemasan yang sudah jadi	1. memperbesar potensi target PAD tidak tercapai 2. Perluasan pasar layanan BIKDK kurang optimal

Nilai TKDN yang terbit tidak optimal	12	Kepala Bidang Industri	Pemenuhan dokumen persyaratan TKDN belum lengkap atau melebihi dari batas waktu yang ditentukan	Kurangnya daya saing perusahaan/industri
Kurangnya minat untuk mendaftar hingga proses sertifikasi TKDN	12	Kepala Bidang Industri	1. Peserta tidak atau belum memahami pentingnya sertifikasi TKDN 2. Persyarata TKDN peserta belum lengkap atau sama sekali belum dimiliki	Kurangnya daya saing perusahaan/industri
Produk IKM yang difasilitasi pameran kurang diminati oleh calon pembeli	12	Kepala BIdang Industri	1. Produk industri (makanan dan minuman) Jawa Tengah belum banyak dikenal oleh masyarakat 2. Produk IKM kurang berdaya saing	1. Pemasaran produk industri (makanan dan minuman) Jawa Tengah belum maksimal 2. IKM belum berhasil memperluas pasar
Kebutuhan tenaga kerja industri alas kaki dan tekstil tidak terpenuhi	16		Kapasitas SDM yang tidak memenuhi standarisasi industri alas kaki dan tekstil	Pelaku industri tekstil dan alas kaki berpindah lokasi produksi ke Provinsi lain
Peserta tidak lolos seleksi perusahaan	12	BIPTAK	Ketrampilan peserta belum memenuhi standar industri	Jumlah calon tenaga kerja yang akan di salurkan ke industri berkurang
Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan kebutuhan industri	12	Kepala BIPTAK	Mesin praktek yang dimiliki sudah out off date	Kualifikasi Kompetensi peserta tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan

Pelatihan tidak menggunakan peralatan praktek yang sesuai dengan kebutuhan industri	12	Kepala BIPTAK	Mesin praktek yang dimiliki sudah out off date	Kualifikasi Kompetensi peserta tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan
Pegawai OPD tidak tanggap dalam perubahan	12		Agen perubahan OPD kurang bekerja optimal	OPD kurang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
Kebutuhan masyakat terkait pelayanan yang cepat dan solutif tidak terpenuhi	12	Kepala Disperindag Prov Jateng	Kurang optimalisasi implementasi digitalisasi pelayanan	Penurunan kinerja pelayanan OPD
Penunjukan vendor tertentu	10	Kepala Disperindag	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran
Penunjukan vendor tertentu	10	Kepala Disperindag	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan
Penunjukan vendor tertentu	10	Kepala Disperindag	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran
Penunjukan vendor tertentu	10	Kepala Disperindag	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan
Penunjukan vendor tertentu	10	Kepala Disperindag	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran

Penunjukan vendor tertentu	10	Kepala Disperindag	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan
Penunjukan vendor tertentu	10	Kepala Disperindag	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran
Penunjukan vendor tertentu	10	Kepala Disperindag	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan
Penunjukan vendor tertentu	10	Kepala Disperindag	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran
Penunjukan vendor tertentu	10	Kepala Disperindag	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan
Penunjukan vendor tertentu	10	Kepala Disperindag	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal atau tidak sesuai dengan nilai anggaran
Penunjukan vendor tertentu	10	Kepala Disperindag	Adanya oknum yang menerima gratifikasi dari vendor tertentu	Hasil pekerjaan tidak optimal , aset masih belum bisa optimal di gunakan

D. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinasmis di Disperindag Provinsi Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi	Pegawai OPD tidak tanggap dalam perubahan	12	Agen perubahan OPD kurang bekerja optimal	OPD kurang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM aparatur	Kepala Disperindag Prov Jateng	2025-2029
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kebutuhan masyakat terkait pelayanan yang cepat dan solutif	12	Kurang optimalisasi implementasi digitalisasi pelayanan	Penurunan kinerja pelayanan OPD	- Menyediakan layanan call center dan digitalisasi pelayanan - Melakukan sertifikasi	Kepala Disperindag Prov Jateng	2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		tidak terpenuhi				standar pelayanan manajemen (ISO:9001)		
Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Kegagalan menghindari atau mengurangi dampak keterjadian resiko	9	Ketidaktepatan penentuan rencana tindak pengendalian	Dampak resiko semakin berat dan meluas	- Identifikasi dan mitigasi resiko mulai dari akar masalah penyebab risiko - Peningkatan kapasitas SDM terkait MR sehingga tepat dalam menentukan risiko dan RTP nya	Kepala Disperindag Prov Jateng	2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- Melakukan evaluasi manajemen		
Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Laju pertumbuhan sector industry	Adanya penutupan usaha industri	12	Peningkatan jumlah industry yang memasuki sunset industri	Penurunan performa sektor industry di Jawa Tengah	- Mendorong perluasan dan pengembangan industry - Upaya penciptaan iklim berusaha yang kondusif	Pemprov Jateng dan Kepala Disperindag Prov Jateng"	2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya PDRB sektor perindustrian	Nilai PDRB sector perindustrian (Milyar Rupiah)	Penurunan daya saing sektor industri	12	Penurunan daya saing produk	Kualitas dan kapasitas produksi tidak sesuai dengan permintaan pasar	Peningkatan kapasitas SDM industry terkait inovasi tecnologi dan produk, Perluasan pasar produk unggulan hasil industry Jawa Tengah	Pemprov Jateng dan Kepala Disperindag Prov Jateng"	2025-2029
Meningkatnya jumlah tenaga kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja industry tekstil dan alas kaki	Kebutuhan tenaga kerja industry alas kaki dan tekstil tidak terpenuhi	16	Kapasitas SDM yang tidak memenuhi standarisasi industry alas kaki dan tekstil	Pelaku industry tekstil dan alas kaki berpindah lokasi produksi ke Provinsi lain	Pelatihan ketrampilan SDM sesuai kebutuhan industry	Pemprov Jateng dan Kepala Disperindag Prov Jateng"	2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju pertumbuhan sector perdagangan	Penurunan kinerja perdagangan internastional	12	Gejolak geopolitik international	Penurunan performa sector perdagangan Jawa Tengah	Perluasan pasar dalam dan luar negeri	Pemprov Jateng dan Kepala Disperindag Prov Jateng"	2025-2029
Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Nilai PDRB sector perdagangan (Milyar Rupiah)	Penurunan daya saing sektor perdagangan	12	Rendahnya daya beli masyarakat	Peningkatan kecenderungan pilihan konsumen pada barang dengan harga murah meskipun bukan produk dalam negeri dan atau barang tidak	Pengawasan distribusi produk, pengawasan mutu produk, pengawasan perijinan pelaku dagang, promosi penggunaan produk dalam negri	Pemprov Jateng dan Kepala Disperindag Prov Jateng"	2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					sesuai standar perlindungan konsumen			
Meningkatnya sistem logistik daerah	Koefisien Variasi Harga antara wilayah tingkat Provinsi	Ketimpangan biaya logistic pada tiap daerah	16	Tingginya ketimpangan pembangunan antar daerah	Peningkatan tingkat dan frekuensi terjadinya inflasi	- Pemantauan harga dan stok kepokmas - Operasi pasar	Pemprov Jateng dan Kepala Disperindag Prov Jateng"	2025-2029

III. Penutup

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah ini disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Dengan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah ini diharapkan dapat semakin realistis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga akan terwujud pencapaian cita-cita pembangunan Jawa Tengah "**JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045"**.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
197007291996031001